MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LKBUN

LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA

TAHUN 2023 *AUDITED*

MEI 2024

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LKBUN

LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA

TAHUN 2023 *AUDITED*

MEI 2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi Kode Etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Bendahara Umum Negara untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Bendahara Umum Negara. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Bendahara Umum Negara, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bendahara Umum Negara tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 34.b/LHP/XV/05/2024 tanggal 20 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 20 Mei 2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Anggota,

Ir. Daniel Lumban Tobing, M.Sc., CSFA., CFrA., CertDA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyajikan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2023 *Audited* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

LKBUN Tahun 2023 *Audited* mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014.

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2023 *Audited* terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

LKBUN Tahun 2023 *Audited* ini merupakan upaya nyata dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUN. Kami menyadari LKBUN Tahun 2023 *Audited* masih belum sempurna. Untuk itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna *(stakeholders)*. Kami sebagai BUN akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKBUN secara akurat dan tepat waktu.

Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara

Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2023 *Audited* yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (iii) Neraca, (iv) Laporan Operasional, (v) Laporan Arus Kas, (vi) Laporan Perubahan Ekuitas dan (vii) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, kecuali untuk hal-hal yang terkait dengan badan lainnya yang berada di luar kendali Bendahara Umum Negara.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 20 Mei 2024
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara

Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL
GEDUNG DJUANDA II LANTAI IV s.d. XIII, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR I, JAKARTA 10710, KOTAK POS 3132
TELEPON (021) 3865430, FAKSIMILE (021) 3440907, SITUS www.itjen.kemenkeu.go.id
SALURAN PENGADUAN www.wise.kemenkeu.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara untuk Tahun Anggaran 2023 pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan adalah penyajian manajemen Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan atas nama Bendahara Umum Negara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa Laporan Keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, 8 Maret 2024
Inspektur Jenderal

Ditandatangani secara elektronik
Awan Nurmawan Nuh

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB iii
PERNYATAAN TELAH DIREVIU v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR SINGKATAN xv
RINGKASAN 1
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 5
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 9
3. NERACA 11
4. LAPORAN OPERASIONAL 15
5. LAPORAN ARUS KAS 17
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 19
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 21

A. PENJELASAN UMUM 21
A.1. DASAR HUKUM 21
A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 22
A.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI 30

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 57
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN BUN 57
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 57
B.2.1. Pendapatan BUN dan Hibah 57
B.2.1.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 57
B.2.1.2. Pendapatan Hibah 65
B.2.2. Belanja BUN 66
B.2.2.1. Belanja Pemerintah Pusat 66
B.2.2.2. Transfer ke Daerah 81
B.2.3. Defisit Anggaran 90
B.2.4. Pembiayaan 90
B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri 91
B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri 103
B.2.5. Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran-SiKPA 108
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA 108

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL 140
C.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN SAL 140
C.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN SAL 140
C.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal 140
C.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 141
C.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 141
C.2.4. Penyesuaian SAL 141
C.2.4.1. Penyesuaian Pembukuan 141
C.2.4.2. Penyesuaian Lain-Lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL) 145
C.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir 148

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 149
D.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM 149
D.2. PENJELASAN PER POS NERACA 150
D.2.1. Aset 150
D.2.1.1. Aset Lancar 150
D.2.1.1.1. Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah 150
D.2.1.1.2. Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Valuta Asing 151
D.2.1.1.3. Kas di Rekening Pemerintah Lainnya 151
D.2.1.1.4. Kas di Rekening Kas di KPPN 154
D.2.1.1.5. Kas Dalam Transito 153
D.2.1.1.6. Kas di Bendahara Pengeluaran 153
D.2.1.1.7. Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga 154
D.2.1.1.8. Kas Lainnya dan Setara Kas 155
D.2.1.1.9. Kas pada Badan Layanan Umum 156
D.2.1.1.10. Uang Muka dari Rekening Khusus 157
D.2.1.1.11. Belanja Dibayar di Muka (Prepaid) 157
D.2.1.1.12. Uang Muka Belanja (Prepayment) 158
D.2.1.1.13. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 158
D.2.1.1.14. Piutang Bukan Pajak 160
D.2.1.1.15. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya 178
D.2.1.1.16. Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman 180
D.2.1.1.17. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak 180
D.2.1.1.18. Piutang PFK 185
D.2.1.1.19. Persediaan 187
D.2.1.2. Investasi Jangka Panjang 187
D.2.1.2.1. Dana Bergulir 187
D.2.1.2.2. Dana Bergulir Diragukan Tertagih 195
D.2.1.2.3. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya 200
D.2.1.2.4. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya 206
D.2.1.2.5. Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah 207
D.2.1.2.6. Investasi Permanen Badan Layanan Umum 218
D.2.1.2.7. Investasi Permanen Lainnya 219
D.2.1.3. Aset Tetap 224
D.2.1.3.1. Tanah 225
D.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin 225
D.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan 226
D.2.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 226
D.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya 227
D.2.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 227
D.2.1.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 228
D.2.1.4. Properti Investasi 229
D.2.1.4.1. Properti Investasi 229
D.2.1.4.2. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi 241
D.2.1.5. Piutang Jangka Panjang 245
D.2.1.5.1. Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman 245
D.2.1.5.2. Piutang Jangka Panjang Lainnya 246
D.2.1.5.3. Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Jangka Panjang 248
D.2.1.6. Aset Lainnya 248
D.2.1.6.1. Aset Tak Berwujud 249
D.2.1.6.2. Dana yang Dibatasi Penggunaannya 250
D.2.1.6.3. Dana Cadangan Penjaminan 262
D.2.1.6.4. Dana Kelolaan Badan Layanan Umum 263
D.2.1.6.5. Dana Jangka Panjang 267

D.2.1.6.6. Aset Lain-lain 269
D.2.1.6.7. Aset Lainnya dari Ekuitas pada UBL 342
D.2.1.6.8. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi pada Aset Lainnya 346
D.2.2. Kewajiban 354
D.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek 354
D.2.2.1.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga 354
D.2.2.1.2. Utang Kepada Pihak Ketiga 355
D.2.2.1.3. Utang Bunga 368
D.2.2.1.4. Utang Subsidi 369
D.2.2.1.5. Utang Transfer 372
D.2.2.1.6. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 375
D.2.2.1.7. Utang Surat Berharga Negara-Jangka Pendek 376
D.2.2.1.8. Pendapatan Diterima di Muka 377
D.2.2.1.9. Pendapatan Yang Ditangguhkan 385
D.2.2.2. Kewajiban Jangka Panjang 385
D.2.2.2.1. Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara 385
D.2.2.2.2. Utang Kepada Dana Pensiun dan THT 386
D.2.2.2.3. Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan 386
D.2.2.2.4. Utang Jangka Panjang Subsidi 387
D.2.2.2.5. Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri 388
D.2.2.2.6. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri lainnya 389
D.2.2.2.7. Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri 392
D.2.2.2.8. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya 392
D.2.3. Ekuitas 393
D.3. Catatan Penting Lainnya 394

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 576
E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL BUN 576
E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL 576
E.2.1. Pendapatan Operasional 576
E.2.1.1. Pendapatan Sumber Daya Alam 577
E.2.1.2. Pendapatan dari Kekayaaan Negara yang Dipisahkan 579
E.2.1.3. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 580
E.2.1.4. Pendapatan Hibah 592
E.2.2. Beban Operasional 592
E.2.2.1. Beban Pegawai 593
E.2.2.2. Beban Persediaan 593
E.2.2.3. Beban Jasa 594
E.2.2.4. Beban Pemeliharaan 594
E.2.2.5. Beban Barang Lainnya 595
E.2.2.6. Beban Bunga 596
E.2.2.7. Beban Subsidi 598
E.2.2.8. Beban Hibah 603
E.2.2.9. Beban Transfer 604
E.2.2.10. Beban Penyusutan dan Amortisasi 609
E.2.2.11. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 611
E.2.2.12. Beban Lain-Lain 614
E.2.3. Kegiatan Non Operasional 619
E.2.3.1. Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar 619
E.2.3.2. Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 621
E.2.3.3. Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya 621
E.2.4. Pos Luar Biasa 629
E.3. Catatan Penting Lainnya 629

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS 632
F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS 632
F.1.1. Saldo Awal Kas 632
F.1.2. Perubahan Kas 632
F.1.3. Saldo Akhir Kas dan Bank 635
F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS 637
F.2.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi 637
F.2.1.1. Penerimaan Perpajakan 637
F.2.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 640
F.2.1.3. Penerimaan Hibah 642
F.2.1.4. Belanja Pegawai 643
F.2.1.5. Belanja Barang 643
F.2.1.6. Belanja Pembayaran Bunga Utang 644
F.2.1.7. Belanja Subsidi 645
F.2.1.8. Belanja Hibah 646
F.2.1.9. Belanja Bantuan Sosial 646
F.2.1.10. Belanja Lain-lain 647
F.2.1.11. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak 647
F.2.1.12. Transfer Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam 647
F.2.1.13. Transfer Dana Bagi Hasil Cukai 648
F.2.1.14. Transfer Dana Alokasi Umum 648
F.2.1.15. Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik 648
F.2.1.16. Transfer Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan D.I.Y, dan Dana Insentif Fiskal (IF) 648
F.2.1.17. Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik 649
F.2.1.18. Dana Desa 649
F.2.1.19. Hibah kepada Daerah 650
F.2.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi 650
F.2.2.1. Pengelolaan dan Penjualan BMN 650
F.2.2.2. Penjualan Aset Program Restrukturisasi 651
F.2.2.3. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir 651
F.2.2.4. Penerimaan Investasi Pemerintah 651
F.2.2.5. Belanja Modal 652
F.2.2.6. Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional 652
F.2.2.7. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir 652
F.2.2.8. Penyertaan Modal Negara 652
F.2.2.9. Pengeluaran Investasi Pemerintah 653
F.2.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 653
F.2.3.1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri 654
F.2.3.2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri 655
F.2.3.3. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman 655
F.2.3.4. Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain 656
F.2.3.5. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri 656
F.2.3.6. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri 656
F.2.3.7. Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari Subsidiary Loan Agreement 656
F.2.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 656
F.2.4.1. Perhitungan Fihak Ketiga (Netto) 657
F.2.4.2. Transito (Netto) 657
F.2.4.3. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Netto) 658
F.2.4.4. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Netto) 658

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 660
G.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 660
G.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 661
G.2.1. Ekuitas Awal 661
G.2.2. Surplus (Defisit) LO 662
G.2.3. Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas 663
G.2.3.1. Koreksi Nilai Persediaan 663
G.2.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi 663
G.2.3.3. Mutasi Ekuitas Bersih Badan Lainnya 666
G.2.3.4. Koreksi SAL 668
G.2.3.5. Lain lain 669
G.2.4. Transaksi Antar Entitas 684
G.2.5. Keuntungan/(Kerugian) Selisih Kurs yang Belum Terealisasi 686
G.2.6. Mutasi Ekuitas BUN DI K/L 686
G.2.7. Ekuitas Akhir 687

H. PENUTUP CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 688

I. LAMPIRAN
A. LAMPIRAN LRA
LB.1. Realisasi Pendapatan BUN dan Hibah Per Akun Tahun 2023 ..... LB1
LB.2. Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2023 ..... LB2
LB.3. Rekapitulasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa per Jenis Transfer Tahun 2023 ..... LB3
LB.4. Laporan Realisasi Transfer ke Daerah Tahun 2023 ..... LB4
LB.5. Rincian Penerimaan Bukan Pajak Lainnya untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 . LB5
LB.6. Laporan Realisasi Anggaran Dana Bagi Hasil Tahun 2023 ..... LB6
LB.7. Laporan Realisasi Anggaran Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 ..... LB7
LB.8. Laporan Realisasi Anggaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2023 ..... LB8
LB.9. Laporan Realisasi Anggaran Dana Alokasi Umum Tahun 2023 ..... LB9
LB.10. Laporan Realisasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun 2023 ..... LB10
LB.11. Laporan Realisasi Anggaran Dana Otonomi Khusus, DID, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Desa Tahun 2023 ..... LB11
LB.12. Laporan Realisasi Anggaran Hibah Kepada Daerah Tahun 2023 ..... LB12
LB.13. Rincian Capaian Output BA BUN Tahun 2023 Audited LB13

B. LAMPIRAN NERACA
LD1a Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum Dalam Rupiah Tahun 2023 ..... LD1a
LD1b Rekening Pemerintah di Bank Indonesia Dalam Valuta Asing Tahun 2023 ..... LD1b
LD.2. Rekening Pemerintah Lainnya Tahun 2023 ..... LD2
LD.3. Rincian Kas di KPPN Tahun 2023 ..... LD3
LD4a Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 ..... LD4a
LD4b Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per K/L Tahun 2023 ..... LD4b
LD5a Kas pada Kementerian Negara/Lembaga berasal dari Hibah Langsung Tahun 2023 ..... LD5a
LD5b Rincian Kas Hibah per K/L Tahun 2023 ..... LD5b
LD6a Rincian Kas Pada Badan Layanan Umum Tahun 2023 ..... LD6a
LD6b Rincian Kas Pada Badan Layanan Umum per K/L Tahun 2023 ..... LD6b
LD.7. Uang Muka Rekening Khusus Tahun 2023 ..... LD7
LD.8a Rincian Piutang PNBP Dividen dan Denda per 31 Desember 2023 ..... LD8a
LD.8b Piutang Transfer ke Daerah Tahun 2023 ..... LD8b
LD.9. Rincian Aset Kredit Eks BPPN LD9
LD.10. Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA LD10
LD.11. Piutang Eks BDL LD11
LD.12. Penyisihan Piutang tidak Tertagih Tahun 2023 ..... LD12

LD.13. Aset Inventaris Eks BPPN LD13
LD.14. Jumlah dan Nilai Aset Properti Eks BPPN LD14
LD.15. Rincian Aset Nostro LD15
LD.16. Surat Berharga Non Saham Eks BPPN LD16
LD.17. Aset Saham Eks BPPN LD17
LD.18. Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA (Persero) LD18
LD.19. Surat Berharga Eks Kelolaan PT PPA LD19
LD.20. Aset Saham Eks Kelolaan PT PPA LD20
LD21a Nilai Pasar Atas ABMA/T Yang Belum Dapat Dilunasi/Diselesaikan LD21a
LD21b Nilai Pasar Atas ABMA/T Yang Ditetapkan Besaran Kompensasinya LD21b
LD.22. Daftar ABMA/T Yang Telah Diterbitkan KMK LD22
LD.23. Daftar Barang Milik Negara Eks BMN Idle yang diserahkan kepada Pengguna Barang atau Pemda LD23
LD.24. Daftar Barang Milik Negara Eks BMN Idle yang Diterima Pengelola Barang LD24
LD.25. Rincian Utang Pajak Rokok Tahun 2023 ..... LD25
LD25a Rincian Utang Retur KPPN LD25a
LD25b Rincian Utang Pihak Ketiga TDF LD25b
LD25c Rincian Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2023 ..... LD25c
LD25d Rincian Utang Subsidi Berdasarkan Tagihan-Tagihan IJP KUR dan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR yang Sudah Dilakukan Verifikasi dan Telah Terbit Berita Acara Verifikasi LD25d
LD25e Utang Transfer ke Daerah Tahun 2023 ..... LD25e
LD.26. Utang SBN Jangka Pendek dan Bagian Lancar SBN Jangka Panjang Rupiah LD26
LD.27. Bagian Lancar SBN Jangka Panjang Valas LD27
LD27a Outstanding Utang PDN LD27a
LD.28. Outstanding Utang Program Pinjaman Luar Negeri per Kreditor LD28
LD28a Outstanding Utang Project Pinjaman Luar Negeri per Kreditor per 31 Desember 2023 ..... LD28a
LD.29. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka LD29
LD.30. Klasifikasi Utang Pemerintah berdasarkan Jatuh Tempo (Umur Utang) LD30
LD.30.a. Unamortized Discount/Premium Obligasi Negara Rupiah LD30a
LD.30.b. Unamortized Discount/Premium Obligasi Negara Valas LD30b
LD.30.c. Unamortized Discount/Premium SBSN Rupiah LD30c
LD.30.d. Unamortized Discount/Premium Bagian Lancar Obligasi Negara Rupiah Tahun 2023 ..... LD30d
LD.30.e. Unamortized Discount/Premium SPN Tahun 2023 ..... LD30e
LD.30.f. Daftar Seri Yang Diterbitkan Sebagai SBN Ditangguhkan LD30f
LD.31.a. Ikhtisar Laporan Keuangan Unit Badan Lainnya Pendapatan, Beban, dan Surplus/ Defisit (Dalam Ribuan Rupiah) LD31a
LD.31.b. Ikhtisar Laporan Keuangan Unit Badan Lainnya - Lembaga Non Struktural Dana APBN dan Non APBN (Dalam Ribuan Rupiah) LD31b
LD.31.c. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya Aktiva, Kewajiban, dan Ekuitas (Dalam Ribuan Rupiah) LD31c
LD.32.a. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara (BUMN) - Laporan Laba Rugi untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 ..... LD32a
LD.32.b. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara (BUMN) – Neraca per 31 Desember 2023 LD32b
LD.32.c. Nilai BPYBDS Pada Persero/Perum LD32c
LD.32.d. Penyertaan Modal Pemerintah pada Non BUMN (Minoritas) Tahun 2023 ..... LD32d
LD.32.e. Ikhtisar Laporan Keuangan Non-BUMN (Minoritas) – Laporan Rugi Laba LD32e
LD.32.f. Ikhtisar Laporan Keuangan Non-BUMN (Minoritas) – Neraca per 31 Desember 2023 ..... LD32f
LD.32.g. Perusahaan Negara/Lembaga dibawah Pembinaan Kementerian Keuangan – Laporan Laba Rugi LD32g
LD.32.h. Perusahaan Negara/Lembaga dibawah Pembinaan Kemenkeu – Neraca LD32h
LD.32.i. Laporan Penyertaan Modal Negara pada Lembaga Keuangan Internasional LD32i
LD.32.j. Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan LD32j
LD.32.k. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan LD32k

LD.32.l. Penjelasan Mutasi Lain Lain Perusahaan Negara (BUMN)..... LD32l
LD.32.m. Ikhtisar Laporan Keuangan Bank Indonesia per 31 Desember 2023.....LD32m
LD.32.n. Ikhtisar Laporan Keuangan BPJS per 31 Desember 2023 ..... LD32n
LD.32.o. Ikhtisar Laporan Keuangan PTNBH per 31 Desember 2023 ..... LD32o

C. LAMPIRAN CPL NERACA

LD.CPL.1. Perhitungan Penyesuaian Bagian Negara pada SKK Migas Tahun 2023..... LDCPL1
LD.CPL.2. Perhitungan Penyesuaian Bagian Negara pada BPMA Tahun 2023 ..... LDCPL2
LD.CPL.3. Rekap Pembayaran dan Penihilan RPATA Tahun 2024 ..... LDCPL3
LD.CPL.4. Penyetoran Pajak Rokok ke RKUD Provinsi dan Rekening BPJS Kesehatan TA 2023 ..... LDCPL4

D. LAMPIRAN LO

LE.1. Rincian Pendapatan Hibah-LO Tahun 2023 Berdasarkan Pemberi Hibah.....LE1
LE.2. Rincian Pendapatan Hibah-LO Tahun 2023 Audited Per Kementerian/Lembaga Penerima Hibah LE2

DAFTAR SINGKATAN

APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan
BAPPENAS	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BDL	:	Bank Dalam Likuidasi
BEI	:	Bursa Efek Indonesia
BHMN	:	Badan Hukum Milik Negara
BI	:	Bank Indonesia
BKKBN	:	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLBI	:	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLU	:	Badan Layanan Umum
BP MIGAS	:	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPOM	:	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPN	:	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPPT	:	Badan Pengkajian dan PenerapanTeknologi
BPYBDS	:	Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
BRR	:	Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi
BULOG	:	Badan Urusan Logistik
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUN	:	Bendahara Umum Negara
CFO	:	*Chief Financial Officer*
CGI	:	*Consultative Group on Indonesia*
COO	:	*Chief Operating Officer*
CPA	:	*Contract Price Aramco*
CPI	:	*Consumer Price Index*
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DAU	:	Dana Abadi Umat
DBH	:	Dana Bagi Hasil
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	:	Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	:	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
DJPb	:	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
EDI	:	*Electronic Data Interchange*
GBHN	:	Garis-Garis Besar Haluan Negara
HTI	:	Hutan Tanaman Industri

HJE	:	Harga Jual Eceran
ICP	:	*Indonesian Crude Price*
INDRA	:	*Indonesian Debt Restructuring Agency*
JBT	:	Jenis Bahan Bakar Tertentu
JBKP	:	Jenis Bahan Bakar Penugasan Khusus
KITE	:	Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KKKS	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KKP	:	Kartu Kredit Pemerintah
K/L	:	Kementerian Negara/Lembaga
KL	:	Kilo Liter
KMK	:	Keputusan Menteri Keuangan
KONI	:	Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KSM	:	Kelompok Swadaya Masyarakat
KU	:	Kiriman Uang
KUHR	:	Kredit Usaha Hutan Rakyat
KUMK	:	Kredit Usaha Mikro dan Kecil
KUN	:	Kas Umum Negara
KUTPA	:	Kredit Usaha Tani Persuteraan Alam
LAK	:	Laporan Arus Kas
LDKP	:	Lembaga Dana Kredit Pedesaan
LDR	:	*Loan to Deposit Ratio*
LKI	:	Lembaga Keuangan Internasional
LKP	:	Lembaga Keuangan Pelaksana
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LNSI	:	Lembaga Non Struktural/Independen
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LO	:	Laporan Operasional
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
LPSAL	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
MA	:	Mata Anggaran (Penerimaan dan Pengeluaran)
MBOPD	:	*Milion Barel of Oil Per Day*
MBOEPD	:	*Milion Barrel Oil of Equivalent Per Day*
MPN	:	Modul Penerimaan Negara
MPN G-2	:	Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua
MT	:	Metrik Ton
NAD	:	Nanggroe Aceh Darussalam
NPG	:	Non Public Goods
NPL	:	*Non-Performing Loan*
PC-PEN	:	Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
PDB	:	Pendapatan Domestik Bruto
PFK	:	Perhitungan Fihak Ketiga
PG	:	Public Goods
PIP	:	Pusat Investasi Pemerintah
PKP2B	:	Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PMA	:	Penanaman Modal Asing

PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMN	:	Penyertaan Modal Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	:	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSL	:	*Past Service Liability*
PSO	:	*Public Service Obligation*
PT PPA	:	PT Perusahaan Pengelolaan Aset
PT PLN	:	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
RANTF	:	*Recovery of Aceh Nias Trust Fund*
RDI	:	Rekening Dana Investasi
RIPPEN	:	Rekening Investasi Pemerintah Pemulihan Ekonomi Nasional
RPATA	:	Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran
RPD	:	Rekening Pembangunan Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RSUP	:	Rumah Sakit Umum Pusat
SIMAK-BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SABL	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-Lain
SABS	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi
SAI	:	Sistem Akuntansi Instansi
SAIP	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah
SAKUN	:	Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
SAL	:	Sisa Anggaran Lebih
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPBL	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Badan Lainnya
SAPP	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
SAPPP	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Penerusan Pinjaman
SATD	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
SATK	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus
SAU	:	Sistem Akuntansi Umum
SAUP	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah
SBN	:	Surat Berharga Negara
SBSN	:	Surat Berharga Syariah Negara
SDA	:	Sumber Daya Alam
SiAP	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat
SIBOR	:	*Singapore Interbank Offered Rate*
SiKPA	:	Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SiLPA	:	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Sikubah	:	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah
SKPA	:	Surat Kuasa Pengguna Anggaran
SKPKB	:	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPLB	:	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

SPAN	:	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPKPBM	:	Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk
SLA	:	*Subsidiary Loan Agreement*
SPPD	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SPN	:	Surat Perbendaharaan Negara
SUN	:	Surat Utang Negara
TA	:	Tahun Anggaran
TDF	:	*Treasury Deposit Facility*
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
THT	:	Tabungan Hari Tua
TNP	:	*Treasury National Polling*
TP	:	Tim Pemberesan Aset
TPA	:	Tagihan Penjualan Angsuran
TSA	:	*Treasury Single Account*
TSP	:	Tempat Simpan Pinjam
UAKBUN	:	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara
UAKKPA BUN	:	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran BUN
UAKPA BUN	:	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran BUN
UAPPA BUN	:	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran BUN
UAPPA-E1 BUN	:	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I BUN
UAKPBUN	:	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu BUN
UAPBUN	:	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN
UABUN	:	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUN
USD	:	*United State Dollar*
USP	:	Usaha Simpan Pinjam
UP	:	Uang Persediaan
TKDD	:	Transfer ke Daerah dan Dana Desa
TUP	:	Tambahan Uang Persediaan
TWh	:	*Tera Whatt Hour*

RINGKASAN

Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan Pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Dalam rangka pelaksanaan SABUN, Kementerian Keuangan selaku BUN membentuk unit akuntansi dan pelaporan berupa Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN (UAP BUN) pada unit eselon I terkait pada Kementerian Keuangan. Khusus untuk SATK, karena UAP BUN TK tersebar pada beberapa unit eselon I, Menteri Keuangan menetapkan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu BUN Transaksi Khusus (UAKP BUN TK).

LKBUN Tahun 2023 *Audited* merupakan gabungan laporan keuangan entitas pelaporan BUN, informasi keuangan yang berada dalam pengelolaan Bendahara Umum Negara (BUN), dan unit-unit terkait lainnya yang mengelola dan/atau menguasai aset Pemerintah yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan kementerian Negara/lembaga, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran BUN menggambarkan perbandingan antara Pagu Anggaran BUN Tahun 2023 *Audited* dengan realisasinya. Laporan Realisasi Anggaran BUN menyajikan informasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan serta SiLPA/SiKPA periode Tahun 2023 *Audited* .

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah BUN pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp272,81 triliun atau mencapai 122,11 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Pendapatan tersebut terdiri dari realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp255,63 triliun atau 116,03 persen, dan realisasi Pendapatan Hibah sebesar Rp17,18 triliun atau 554,33 persen. Sementara itu, realisasi Belanja BUN pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.968,99 triliun atau 99,43 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja Negara BUN tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.087,56 triliun atau 99,55 persen dari anggarannya, dan realisasi Transfer untuk Daerah sebesar Rp881,43 triliun atau 99,28 persen dari anggarannya.

Realisasi Defisit Anggaran BUN Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.696,18 triliun atau 96,55 persen dari anggarannya. Sedangkan realisasi Pembiayaan Neto Tahun 2023 adalah sebesar Rp356,66 triliun atau 74,32 persen dari anggarannya. Dari data tersebut maka SiKPA sebelum Pendapatan dan Belanja K/L sebesar Rp1.339,51 triliun.

Ringkasan LRA BUN Tahun 2023 *Audited* disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
	Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi	
Pendapatan dan Hibah BUN	**223.406.883.238.000**	**272.810.959.159.689**	**122,11%**	**238.341.910.771.353**
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	220.306.883.238.000	255.626.800.279.964	116,03%	232.645.855.357.561
Pendapatan Hibah	3.100.000.000.000	17.184.158.879.725	554,33%	5.696.055.413.792
Belanja BUN	**1.980.251.879.807.000**	**1.968.987.928.663.857**	**99,43%**	**2.011.588.067.001.453**
Belanja Pemerintah Pusat	1.092.436.267.139.000	1.087.557.384.455.403	99,55%	1.195.353.240.933.757
Transfer ke Daerah	887.815.612.668.000	881.430.544.208.454	99,28%	816.234.826.067.696
Surplus (Defisit)	**(1.756.844.996.569.000)**	**(1.696.176.969.504.168)**	**96,55%**	**(1.773.246.156.230.100)**
Pembiayaan	**479.927.462.971.000**	**356.663.747.714.521**	**74,32%**	**590.978.140.090.153**
SiLPA (SiKPA)	**(1.276.917.533.598.000)**	**(1.339.513.221.789.647)**	**104,90%**	**(1.182.268.016.139.947)**

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih periode pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih 31 Desember 2022 adalah Rp478,96 triliun, Penggunaan SAL adalah minus Rp35 triliun, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berjalan adalah Rp19,38 triliun, Penyesuaian sebesar minus Rp3,84 triliun, sehingga Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2023 adalah Rp459,50 triliun.

Ringkasan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BUN Tahun 2023 *Audited* dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	**478.957.156.319.401**	**337.779.006.818.346**
Penggunaan SAL	(35.000.000.000.000)	0
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	19.376.178.937.101	130.558.467.051.951
Penyesuaian	(3.835.463.185.804)	10.619.682.449.104
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir	**459.497.872.070.698**	**478.957.156.319.401**

3. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan BUN mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2023.

Jumlah Aset per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.547,54 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp516,59 triliun, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp4.077,23 triliun, Aset Tetap sebesar Rp1,10 triliun, Properti Investasi sebesar Rp32,34 triliun, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp47,83 triliun dan Aset Lainnya sebesar Rp872,44 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8.875,73 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp1.021,41 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp7.854,32 triliun. Sementara itu, jumlah Ekuitas Neto per 31 Desember 2023 adalah sebesar minus Rp3.328,19 triliun.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset		
Aset Lancar	516.599.537.055.275	538.706.231.713.917
Investasi Jangka Panjang	4.077.230.147.021.115	3.759.590.948.039.254
Aset Tetap	1.103.692.967.001	1.046.802.105.728
Properti Investasi	32.335.552.112.417	31.062.733.305.865
Piutang Jangka Panjang	47.830.027.314.323	52.136.458.878.032
Aset Lainnya	872.442.600.802.495	730.812.322.007.366
Jumlah Aset	**5.547.541.557.272.626**	**5.113.355.496.050.162**
Kewajiban		
Kewajiban Jangka Pendek	1.021.405.167.888.606	851.240.032.862.444
Kewajiban Jangka Panjang	7.854.324.339.772.497	7.524.375.730.483.493
Jumlah Kewajiban	**8.875.729.507.661.103**	**8.375.615.763.345.937**
Ekuitas	**(3.328.187.950.388.477)**	**(3.262.260.267.295.775)**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**5.547.541.557.272.626**	**5.113.355.496.050.162**

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional memberikan informasi tentang ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh BUN untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah Tahun 2023 *Audited* . Laporan Operasional memberikan informasi bahwa pendapatan operasional selama Tahun 2023 *Audited* adalah Rp565,95 triliun, beban operasional sebesar Rp2.090,68 triliun dan kegiatan non operasional sebesar Rp61,05 triliun, sehingga terdapat Defisit sebesar Rp1.463,68 triliun.

Ringkasan Laporan Operasional BUN Tahun 2023 *Audited* dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kegiatan Operasional		
Pendapatan Operasional	565.945.322.925.559	527.599.941.416.642
Beban Operasional	2.090.676.704.024.191	2.109.524.586.743.946
Surplus (Defisit) Keg. Operasional	**(1.524.731.381.098.632)**	**(1.581.924.645.327.304)**
Kegiatan Non Operasional	61.050.114.639.751	(136.076.943.706.849)
Pos Luar Biasa	-	-
Surplus/Defisit-LO	**(1.463.681.266.458.881)**	**(1.718.001.589.034.153)**

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun 2023 *Audited* , serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2023. Saldo Akhir Kas Bendahara Umum Negara (BUN), Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas di Kementerian Negara/Lembaga (K/L) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp606,01 triliun. Saldo Akhir tersebut merupakan penjumlahan dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp536,44 triliun, Kenaikan Kas sebesar Rp108,14 triliun dan Penyesuaian sebesar minus Rp38,57 triliun. Kenaikan saldo kas tersebut berasal dari arus kas aktivitas operasi sebesar minus Rp34,79

triliun, arus kas aktivitas investasi sebesar minus Rp391,62 triliun, arus kas aktivitas pendanaan sebesar Rp445,79 triliun, dan arus kas aktivitas transitoris sebesar Rp88,76 triliun.

Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun 2023 *Audited* dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Saldo Awal Kas BUN, KPPN, BLU, dan di K/L	**536.443.156.881.227**	**374.272.452.880.577**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(34.793.236.369.070)	(220.433.644.891.532)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(391.624.901.747.838)	(347.174.022.486.045)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	445.794.317.054.009	698.166.134.429.528
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	88.761.873.212.786	20.042.387.123.266
Kenaikan (Penurunan) Kas Sebelum Penyesuaian	**108.138.052.149.887**	**150.600.854.175.217**
Koreksi SILPA	1.496.864.847.086	9.137.971.841.987
Penyesuaian Selisih Kurs	(529.364.838.247)	3.676.340.697.318
Akumulasi Koreksi Pembukuan	(4.534.436.524.122)	(1.244.462.713.872)
Penggunaan SAL	(35.000.000.000.000)	-
Kenaikan (Penurunan) Kas Setelah Penyesuaian	**69.571.115.634.604**	**162.170.704.000.650**
Saldo Akhir Kas BUN, KPPN, BLU, dan di K/L	**606.014.272.515.831**	**536.443.156.881.227**

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar minus Rp3.262,26 triliun, Defisit LO sebesar Rp1.463,68 triliun, Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah Ekuitas sebesar Rp34,51 triliun, Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1.338,75 triliun, dan Mutasi Ekuitas BUN di KL sebesar Rp24,50 triliun. Dari data tersebut diketahui bahwa Penurunan Ekuitas sebesar Rp65,93 triliun dan Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 adalah minus Rp3.328,19 triliun.

Ringkasan Perubahan Ekuitas BUN Tahun 2023 *Audited* dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Ekuitas Awal	**(3.262.260.267.295.775)**	**(2.842.111.919.515.711)**
Surplus/Defisit LO	(1.463.681.266.458.881)	(1.718.001.589.034.153)
Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/ Mengurangi Ekuitas	34.506.754.444.633	(1.348.967.550.000)
Transaksi Antar Entitas	1.338.745.845.087.589	1.301.105.973.365.087
Mutasi Ekuitas BUN di K/L	24.500.983.833.957	(1.903.764.560.998)
Kenaikan/Penurunan ekuitas	**(65.927.683.092.702)**	**(420.148.347.780.064)**
Ekuitas Akhir	**(3.328.187.950.388.477)**	**(3.262.260.267.295.775)**

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum penyusunan LK BUN, metodologi penyusunan LKBUN dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Tahun 2023			Tahun 2022
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
A. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH	B.2.1	223.406.883.238.000	272.810.959.159.689	122,11%	238.341.910.771.353
1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1.1	220.306.883.238.000	255.626.800.279.964	116,03%	232.645.855.357.561
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	B.2.1.1.1	105.893.722.264.000	118.872.894.679.746	112,26%	150.863.599.696.975
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	B.2.1.1.2	81.535.797.918.000	82.058.743.373.870	100,64%	40.597.091.946.149
c. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.2.1.1.3	32.877.363.056.000	54.695.162.226.348	166,36%	41.185.163.714.437
2. Pendapatan Hibah	B.2.1.2	3.100.000.000.000	17.184.158.879.725	554,33%	5.696.055.413.792
B. BELANJA BUN	B.2.2	1.980.251.879.807.000	1.968.987.928.663.857	99,43%	2.011.588.067.001.453
1. Belanja Pemerintah Pusat	B.2.2.1	1.092.436.267.139.000	1.087.557.384.455.403	99,55%	1.195.353.240.933.757
a. Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	151.661.953.816.000	151.424.302.225.988	99,84%	144.760.288.597.066
b. Belanja Barang	B.2.2.1.2	1.560.301.241.000	1.415.601.962.907	90,73%	1.249.177.651.197
c. Belanja Pembayaran Bunga Utang	B.2.2.1.3	441.400.000.000.000	439.882.584.341.259	99,66%	386.341.819.789.815
d. Belanja Subsidi	B.2.2.1.4	271.079.597.815.000	269.592.086.053.747	99,45%	252.812.907.867.326
e. Belanja Hibah	B.2.2.1.5	238.197.041.000	219.140.718.777	92,00%	5.803.272.496.643
f. Belanja Lain Lain	B.2.2.1.6	226.496.217.226.000	225.023.669.152.725	99,35%	404.385.774.531.710
2. Transfer ke Daerah	B.2.2.2	887.815.612.668.000	881.430.544.208.454	99,28%	816.234.826.067.696
a. Dana Bagi Hasil	B.2.2.2.1	205.888.399.698.000	205.666.564.020.630	99,89%	168.414.110.278.434
b. Dana Alokasi Umum	B.2.2.2.2	398.162.039.057.000	398.029.628.594.542	99,97%	378.000.000.000.000
c. Dana Alokasi Khusus	B.2.2.2.3	187.103.910.343.000	181.357.561.783.241	96,93%	173.164.641.054.831
1) Dana Alokasi Khusus Fisik	B.2.2.2.3.1	53.422.463.835.000	50.334.741.347.305	94,22%	54.783.954.054.112
2) Dana Alokasi Khusus Non Fisik	B.2.2.2.3.2	130.214.110.762.000	128.081.946.376.309	98,36%	118.380.687.000.719
3) Hibah Kepada Daerah	B.2.2.2.3.3	3.467.335.746.000	2.940.874.059.627	84,82%	-

URAIAN	CATATAN	Tahun 2023			Tahun 2022
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
d. Dana Otonomi Khusus	B.2.2.2.4	17.241.263.570.000	17.241.263.570.000	100,00%	20.436.263.570.000
e. Dana Keistimewaan DI Yogyakarta	B.2.2.2.5	1.420.000.000.000	1.372.725.809.224	96,67%	1.320.000.000.000
f. Dana Desa	B.2.2.2.6	70.000.000.000.000	69.856.768.617.317	99,80%	67.906.138.390.431
g. Insentif Fiskal	B.2.2.2.7	8.000.000.000.000	7.906.031.813.500	98,83%	6.993.672.774.000
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	**B.2.3**	**(1.756.844.996.569.000)**	**(1.696.176.969.504.168)**	**96,55%**	**(1.773.246.156.230.100)**
D. PEMBIAYAAN	**B.2.4**	**479.927.462.971.000**	**356.663.747.714.521**	**74,32%**	**590.978.140.090.153**
1. Pembiayaan Dalam Negeri	**B.2.4.1**	**498.362.712.804.000**	**277.369.700.819.453**	**55,66%**	**563.782.350.533.612**
a. Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL)	B.2.4.1.1	226.880.171.913.000	35.000.000.000.000	15,43%	-
b. Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Pembangunan Hutan	B.2.4.1.2	2.225.200.000.000	2.225.200.000.000	100,00%	
c. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	B.2.4.1.3	6.349.993.814.000	6.374.398.495.969	100,38%	3.952.157.097.370
d. Penerimaan Hasil Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	B.2.4.1.4	609.660.828.000	1.097.737.606.166	180,06%	667.176.265.512
e. Surat Berharga Negara (Neto)	B.2.4.1.5	437.834.050.997.000	308.193.788.405.962	70,39%	658.816.905.421.376
1) Penerimaan Penjualan Surat Berharga Negara		-	848.108.055.742.428	-	1.097.456.235.269.295
2) Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan Surat Berharga Negara		-	(539.914.267.336.466)	-	(438.639.329.847.919)
f. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1.6	749.450.378.000	14.558.368.405.525	1942,54%	8.201.282.354.241
1) Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri		3.481.576.753.000	17.504.129.527.679	502,76%	10.125.528.103.890
2) Pembayaran cicilan pokok PDN		(2.732.126.375.000)	(2.945.761.122.154)	107,82%	(1.924.245.749.649)
g. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah (Neto)	B.2.4.1.7	(155.955.303.621.000)	(69.897.795.440.654)	44,82%	(86.724.307.604.887)
h. Pengeluaran Kewajiban Penjaminan	B.2.4.1.8	(330.511.505.000)	(330.511.505.000)	100,00%	(1.130.863.000.000)
i. Pengeluaran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	B.2.4.1.9	(20.000.000.000.000)	(20.000.000.000.000)	100,00%	(20.000.000.000.000)
i. Pembiayaan Lain-Lain	B.2.4.1.10		148.514.851.485	-	
2. Pembiayaan Luar Negeri	**B.2.4.2**	**(18.435.249.833.000)**	**79.294.046.895.068**	**(430,12%)**	**27.195.789.556.541**
a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	B.2.4.2.1	62.056.062.121.000	162.650.352.798.218	262,10%	108.283.083.586.601

URAIAN	CATATAN	Tahun 2023			Tahun 2022
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1) Penarikan Pinjaman Tunai	B.2.4.2.1.1	29.500.000.000.000	82.990.780.840.684	281,32%	65.592.711.439.666
2) Penarikan Pinjaman Kegiatan	B.2.4.2.1.2	32.556.062.121.000	79.659.571.957.534	244,68%	42.690.372.146.935
b. Pemberian Pinjaman	B.2.4.2.2	(1.065.247.517.000)	(1.905.999.112.657)	178,93%	(1.805.388.784.603)
c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	B.2.4.2.3	(79.426.064.437.000)	(81.450.306.790.493)	102,55%	(79.281.905.245.457)
E. SiLPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	**B.2.5**	**(1.276.917.533.598.000)**	**(1.339.513.221.789.647)**	**104,90%**	**(1.182.268.016.139.947)**

Jakarta, 20 Mei 2024
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara

Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(DALAM RUPIAH)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
A. SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	**C.2.1.**	**478.957.156.319.401**	**337.779.006.818.346**
B. PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	**C.2.2.**	**(35.000.000.000.000)**	**0**
C. SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	**C.2.3.**	**19.376.178.937.101**	**130.558.467.051.951**
Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A + B + C)		**463.333.335.256.502**	**468.337.473.870.297**
D. PENYESUAIAN SAL	**C.2.4.**		
1. Penyesuaian Pembukuan	**C.2.4.1.**	(3.548.034.701.030)	11.648.084.260.735
2. Penyesuaian Lain-Lain	**C.2.4.2.**	(287.428.484.774)	(1.028.401.811.631)
Total Penyesuaian SAL		**(3.835.463.185.804)**	**10.619.682.449.104**
E. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (A+B+C+D)	**C.2.5.**	**459.497.872.070.698**	**478.957.156.319.401**

Jakarta, 20 Mei 2024
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara

Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

BENDAHARA UMUM NEGARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(DALAM RUPIAH)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
ASET	D.2.1		
ASET LANCAR	D.2.1.1		
Kas dan Setara Kas			
Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah	D.2.1.1.1	149.595.370.820.262	238.395.756.100.437
Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Valuta Asing	D.2.1.1.2	193.240.328.220.314	155.700.705.471.006
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	D.2.1.1.3	3.507.746.680.531	5.451.617.307.850
Kas di Rekening Kas di KPPN	D.2.1.1.4	5.128.787.424.755	2.774.997.342.454
Kas Dalam Transito	D.2.1.1.5	4.930.665.723	799.340.452
Kas di Bendahara Pengeluaran	D.2.1.1.6	197.710.858.794	215.927.152.362
Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga	D.2.1.1.7	13.992.553.217.607	2.895.708.729.836
Kas Lainnya dan Setara Kas	D.2.1.1.8	5.008.114.675.567	29.899.867.163
Kas pada Badan Layanan Umum	D.2.1.1.9	92.393.578.520.721	78.971.222.880.967
Jumlah Kas dan Setara Kas		**463.069.121.084.274**	**484.436.634.192.527**
Uang Muka			
Uang Muka dari Rekening Khusus	D.2.1.1.10	44.479.546.335	20.878.963.110
Jumlah Uang Muka		**44.479.546.335**	**20.878.963.110**
Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)			
Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)	D.2.1.1.11	22.930.421.699	22.006.153.883
Uang Muka Belanja (*Prepayment*)	D.2.1.1.12	10.000.000	10.000.000
Jumlah Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)		**22.940.421.699**	**22.016.153.883**
Piutang			
Pendapatan yang masih harus diterima	D.2.1.1.13	4.303.538.793.658	4.121.830.752.438
Piutang Bukan Pajak	D.2.1.1.14	241.872.476.098.171	241.374.054.869.037
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.1.1.15	7.506.739.181.179	7.695.816.466.255
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	D.2.1.1.16	20.910.716.095.280	23.717.712.129.347
(Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak)	D.2.1.1.17	(221.131.800.263.552)	(222.683.814.334.009)
Piutang PFK	D.2.1.1.18	109.652.841	22.005.766
Jumlah Piutang		**53.461.779.557.577**	**54.225.621.888.834**
Persediaan			
Persediaan	D.2.1.1.19	1.216.445.390	1.080.515.563
Jumlah Persediaan		**1.216.445.390**	**1.080.515.563**
Jumlah Aset Lancar		**516.599.537.055.275**	**538.706.231.713.917**
INVESTASI JANGKA PANJANG	D.2.1.2		
Investasi Non Permanen			
Dana Bergulir	D.2.1.2.1	19.553.196.920.303	18.311.462.826.420
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	D.2.1.2.2	(1.562.930.032.200)	(4.813.478.526.898)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	D.2.1.2.3	280.412.334.935.034	239.872.791.752.439
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	D.2.1.2.4	(945.649.215.159)	(760.196.912.027)
Jumlah Investasi Non Permanen		**297.456.952.607.978**	**252.610.579.139.934**
Investasi Permanen			
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	D.2.1.2.5	3.093.225.298.186.938	2.909.868.558.921.828
Investasi Permanen Badan Layanan Umum	D.2.1.2.6	8.053.004.500	8.958.055.146
Investasi Permanen Lainnya	D.2.1.2.7	686.539.843.221.699	597.102.851.922.346
Jumlah Investasi Permanen		**3.779.773.194.413.137**	**3.506.980.368.899.320**
Jumlah Investasi Jangka Panjang		**4.077.230.147.021.115**	**3.759.590.948.039.254**
ASET TETAP	D.2.1.3		
Tanah	D.2.1.3.1	26.594.107.000	26.594.107.000
Peralatan dan Mesin	D.2.1.3.2	419.497.435.733	524.353.291.311
Gedung dan Bangunan	D.2.1.3.3	60.946.355.841	43.006.647.389
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	D.2.1.3.4	1.401.969.922.187	1.225.899.884.858
Aset Tetap Lainnya	D.2.1.3.5	47.793.132.611	44.013.820.603
Konstruksi Dalam Pengerjaan	D.2.1.3.6	36.069.517.195	34.045.320.632
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	D.2.1.3.7	(889.177.503.566)	(851.110.966.065)
Jumlah Aset Tetap Kotor		**1.992.870.470.567**	**1.897.913.071.793**
Jumlah Aset Tetap Bersih		**1.103.692.967.001**	**1.046.802.105.728**
PROPERTI INVESTASI	D.2.1.4		
Properti Investasi	D.2.1.4.1	88.129.217.464.588	85.204.280.160.868
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	D.2.1.4.2	(55.793.665.352.171)	(54.141.546.855.003)
Jumlah Properti Investasi		**32.335.552.112.417**	**31.062.733.305.865**
PIUTANG JANGKA PANJANG	D.2.1.5		
Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	D.2.1.5.1	48.644.267.627.749	52.972.302.791.953
Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.1.5.2	2.207.678.942.380	2.236.811.940.347
(Peny. PiutangTakTertagih Piutang Jangka Panjang)	D.2.1.5.3	(3.021.919.255.806)	(3.072.655.854.268)
Jumlah Piutang Jangka Panjang bersih		**47.830.027.314.323**	**52.136.458.878.032**
ASET LAINNYA	D.2.1.6		
Aset Tak Berwujud	D.2.1.6.1	116.979.217.170	190.240.614.474
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	D.2.1.6.2	446.302.794.935.058	319.881.409.961.767
Dana Cadangan Penjaminan	D.2.1.6.3	12.216.159.505.000	11.885.648.000.000
Dana Kelolaan Badan Layanan Umum	D.2.1.6.4	16.047.968.379.573	10.340.470.045.889
Dana Jangka Panjang	D.2.1.6.5	36.015.899.438.036	28.798.237.380.309
Aset Lain-lain	D.2.1.6.6	644.945.117.418.303	614.634.699.183.703
Aset Lainnya dari Ekuitas pada UBL	D.2.1.6.7	29.854.766.285.853	29.625.443.493.878
Jumlah Aset Lainnya kotor		**1.185.499.685.178.993**	**1.015.356.148.680.020**

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
(Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi pada Aset Lainnya)	D.2.1.6.8	(313.057.084.376.498)	(284.543.826.672.654)
Jumlah Aset Lainnya Bersih		**872.442.600.802.495**	**730.812.322.007.366**
JUMLAH ASET		**5.547.541.557.272.626**	**5.113.355.496.050.162**
KEWAJIBAN	D.2.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	D.2.2.1		
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	D.2.2.1.1	4.536.797.626.051	3.916.380.112.882
Utang Kepada Pihak Ketiga	D.2.2.1.2	153.795.462.145.737	111.016.588.119.672
Utang Bunga	D.2.2.1.3	112.693.785.312.937	97.401.735.689.433
Utang Subsidi	D.2.2.1.4	27.848.746.955.563	15.233.102.271.564
Utang Transfer	D.2.2.1.5	52.187.965.129.846	49.842.043.112.377
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	D.2.2.1.6	638.823.906.087.471	524.941.666.493.795
Unamortized Discount		(368.630.075.000)	(414.105.480.000)
Unamortized Premium		440.320.180.000	795.587.678.000
Utang Surat Berharga Negara-Jangka Pendek	D.2.2.1.7	31.412.000.000.000	49.028.000.000.000
Unamortized Discount		(467.650.585.000)	(548.373.999.000)
Pendapatan Diterima di Muka	D.2.2.1.8	98.847.394.100	23.352.703.695
Pendapatan Yang Ditangguhkan	D.2.2.1.9	403.617.716.901	4.056.160.026
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**1.021.405.167.888.606**	**851.240.032.862.444**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	D.2.2.2		
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara	D.2.2.2.1	6.563.241.522.670.168	6.361.787.234.099.673
Unamortized Discount		(49.942.041.191.000)	(52.953.994.105.000)
Unamortized Premium		44.567.904.657.000	43.768.938.860.000
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	D.2.2.2.2	25.871.215.355.337	24.446.771.532.148
Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan	D.2.2.2.3	39.891.869.021.700	-
Utang Jangka Panjang Subsidi	D.2.2.2.4	560.625.887.734	27.102.028.797.720
Utang Jangka Panjang-Pinjaman Dalam Negeri	D.2.2.2.5	31.552.061.212.395	18.141.468.578.073
Utang Jangka Panjang DN Lainnya	D.2.2.2.6	312.277.312.036.535	279.218.156.681.472
Jumlah Utang Jangka Panjang DN		**6.968.020.469.649.869**	**6.701.510.604.444.086**
Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri	D.2.2.2.7	886.277.290.731.920	822.838.479.742.048
Utang Jangka Panjang LN Lainnya	D.2.2.2.8	26.579.390.708	26.646.297.359
Jumlah Utang Jangka Panjang LN		**886.303.870.122.628**	**822.865.126.039.407**
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		**7.854.324.339.772.497**	**7.524.375.730.483.493**
JUMLAH KEWAJIBAN		**8.875.729.507.661.103**	**8.375.615.763.345.937**
EKUITAS	D.2.3	**(3.328.187.950.388.477)**	**(3.262.260.267.295.775)**
JUMLAH EKUITAS NETO		**(3.328.187.950.388.477)**	**(3.262.260.267.295.775)**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**5.547.541.557.272.626**	**5.113.355.496.050.162**

Jakarta, 20 Mei 2024
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara

Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(DALAM RUPIAH)

URAIAN	CATATAN	Tahun 2023	Tahun 2022
A. KEGIATAN OPERASIONAL			
I. Pendapatan			
1. Pendapatan Negara Bukan Pajak		**539.048.066.196.555**	**509.699.262.247.570**
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	E.2.1.1	145.845.627.194.635	182.453.640.268.794
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	E.2.1.2	4.529.734	819.575
c. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	E.2.1.3	393.202.434.472.186	327.245.621.159.201
2. Pendapatan Hibah	E.2.1.4	**26.897.256.729.004**	**17.900.679.169.072**
a. Pendapatan Hibah Dalam Negeri		18.681.668.376.346	6.368.840.606.890
b. Pendapatan Hibah Luar Negeri		8.215.588.352.658	11.531.838.562.182
Jumlah Pendapatan	**E.2.1**	**565.945.322.925.559**	**527.599.941.416.642**
II. Beban			
1. Beban Pegawai	E.2.2.1	155.015.591.372.012	166.825.221.592.907
2. Beban Persediaan	E.2.2.2	1.364.078.683	1.451.347.141
3. Beban Jasa	E.2.2.3	306.963.409.617	287.297.634.163
4. Beban Pemeliharaan	E.2.2.4	16.984.662	19.052.080
5. Beban Barang Lainnya	E.2.2.5	1.117.465.790.616	958.794.033.443
6. Beban Bunga	E.2.2.6	489.648.053.202.050	409.393.545.381.079
7. Beban Subsidi	E.2.2.7	251.951.604.553.533	253.662.415.148.483
8. Beban Hibah	E.2.2.8	219.140.718.777	5.803.272.496.643
9. Beban Transfer	E.2.2.9	881.390.373.057.804	819.069.477.047.347
10. Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.2.2.10	27.767.138.903.095	28.515.372.568.357
11. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	E.2.2.11	(2.426.602.692.679)	14.826.408.996.259
12. Beban Lain-Lain	E.2.2.12	285.685.594.646.021	410.181.311.446.044
Jumlah Beban	**E.2.2**	**2.090.676.704.024.191**	**2.109.524.586.743.946**
Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional		**(1.524.731.381.098.632)**	**(1.581.924.645.327.304)**
B. KEGIATAN NON OPERASIONAL			
1. Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	E.2.3.1	(548.331.294.499)	(81.309.693.787)
2. Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jk. Panjang	E.2.3.2	(431.442.410.900)	(1.337.452.801.614)
3. Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.2.3.3	62.029.888.345.150	(134.658.181.211.448)
Jumlah Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional	**E.2.3**	**61.050.114.639.751**	**(136.076.943.706.849)**
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		**(1.463.681.266.458.881)**	**(1.718.001.589.034.153)**
C. POS LUAR BIASA			
1. Pendapatan Luar Biasa		**-**	**-**
2. Beban Luar Biasa		-	-
Jumlah Pos Luar Biasa	**E.2.4**	**-**	**-**
D. SURPLUS (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL		**(1.463.681.266.458.881)**	**(1.718.001.589.034.153)**

Jakarta, 20 Mei 2024
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara

Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(DALAM RUPIAH)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
A ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	F.2.1		
I Arus Kas Masuk			
1 Penerimaan Perpajakan	F.2.1.1	**2.154.208.219.467.830**	**2.034.552.436.470.075**
a Pajak Penghasilan	F.2.1.1.1	1.061.234.020.639.596	998.213.803.714.799
b Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	F.2.1.1.2	763.632.668.212.526	687.609.450.256.247
c Pajak Bumi dan Bangunan	F.2.1.1.3	33.270.661.547.958	23.264.663.527.700
d Cukai	F.2.1.1.4	221.851.144.542.725	226.880.753.312.323
e Pajak Lainnya	F.2.1.1.5	9.729.790.060.612	7.686.100.141.265
f Pajak Perdagangan Internasional	F.2.1.1.6	64.489.934.464.413	90.897.665.517.741
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	F.2.1.2	**611.990.337.922.242**	**595.010.280.203.205**
a Pendapatan Sumber Daya Alam	F.2.1.2.1	254.203.031.073.614	268.770.896.270.784
b Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	F.2.1.2.2	82.058.743.373.870	40.597.091.946.149
c Pendapatan PNBP Lainnya	F.2.1.2.3	179.868.171.315.795	195.739.979.810.678
d Pendapatan BLU	F.2.1.2.4	95.860.392.158.963	89.902.312.175.594
3 Penerimaan Hibah	F.2.1.3	**17.184.158.879.725**	**5.696.055.413.792**
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)		**2.783.382.716.269.797**	**2.635.258.772.087.072**
II Arus Kas Keluar			
1 Belanja Pegawai	F.2.1.4	412.711.324.466.564	402.441.656.300.334
2 Belanja Barang	F.2.1.5	432.714.969.865.127	426.149.081.519.090
3 Belanja Pembayaran Bunga Utang	F.2.1.6	439.882.584.341.259	386.341.819.789.815
4 Belanja Subsidi	F.2.1.7	269.592.086.053.747	252.812.907.867.326
5 Belanja Hibah	F.2.1.8	219.140.718.777	5.803.272.496.643
6 Belanja Bantuan Sosial	F.2.1.9	156.601.633.832.214	161.523.078.405.990
7 Belanja Lain-lain	F.2.1.10	225.023.669.152.725	404.385.774.531.710
8 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak	F.2.1.11	63.845.997.623.000	62.998.688.562.915
9 Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	F.2.1.12	135.944.555.602.100	100.823.947.472.776
10 Transfer Dana Bagi Hasil Cukai	F.2.1.13	5.876.010.795.530	4.591.474.242.743
11 Transfer Dana Alokasi Umum	F.2.1.14	398.029.628.594.542	378.000.000.000.000
12 Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik	F.2.1.15	50.334.741.347.305	54.783.954.054.112
13 Transfer Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan – Daerah Istimewa Yogyakarta, Insentif Fiskal	F.2.1.16	26.520.021.192.724	28.749.936.344.000
14 Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik	F.2.1.17	128.081.946.376.309	118.380.687.000.719
15 Dana Desa	F.2.1.18	69.856.768.617.317	67.906.138.390.431
16 Hibah Kepada Daerah	F.2.1.19	2.940.874.059.627	
Jumlah Arus Kas keluar (A.II)		**2.818.175.952.638.867**	**2.855.692.416.978.604**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I-A.II)		**(34.793.236.369.070)**	**(220.433.644.891.532)**
B ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	F.2.2		
I Arus Kas Masuk			
1 Pengelolaan dan Penjualan BMN	F.2.2.1	546.960.660.401	584.273.977.400
2 Penjualan Aset Program Restrukturisasi	F.2.2.2	1.097.737.606.166	667.176.265.512
3 Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.2.3	359.653.415.387	22.000.000.000
4 Penerimaan Investasi Pemerintah	F.2.2.4	26.441.256.275.225	27.059.703.613.522
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)		**28.445.607.957.179**	**28.333.153.856.434**
II Arus Kas Keluar			
1 Belanja Modal	F.2.2.5	303.041.293.068.751	240.570.302.124.070
2 Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional	F.2.2.6	20.000.000.000.000	20.000.000.000.000
3 Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.2.7	2.225.200.000.000	0
4 Penyertaan Modal Negara	F.2.2.8	41.421.985.992.266	60.664.867.718.409

URAIAN	CATATAN	2023	2022
5 Pengeluaran Investasi Pemerintah	F.2.2.9	53.382.030.644.000	54.272.006.500.000
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)		**420.070.509.705.017**	**375.507.176.342.479**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I – B.II)		**(391.624.901.747.838)**	**(347.174.022.486.045)**
C ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	F.2.3		
I Arus Kas Masuk			
1 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.3.1	902.837.385.270.107	1.107.581.763.373.185
2 Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	F.2.3.2	162.650.352.798.218	108.283.083.586.601
3 Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	F.2.3.3	6.374.398.495.969	3.952.157.097.370
4 Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	F.2.3.4	148.514.851.485	0
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)		**1.072.010.651.415.779**	**1.219.817.004.057.156**
II Arus Kas Keluar			
1 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.3.5	542.860.028.458.620	440.563.575.597.568
2 Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	F.2.3.6	81.450.306.790.493	79.281.905.245.457
3 Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari Subsidiary Loan Agreement	F.2.3.7	1.905.999.112.657	1.805.388.784.603
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)		**626.216.334.361.770**	**521.650.869.627.628**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (C.I-C.II)		**445.794.317.054.009**	**698.166.134.429.528**
D ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	F.2.4		
1 Perhitungan Fihak Ketiga (Netto)	F.2.4.1	620.329.866.094	151.170.449.070
2 Transito (Netto)	F.2.4.2	14.112.089.380.009	(3.468.162.038.412)
3 Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Netto)	F.2.4.3	74.033.583.845.555	23.360.027.823.784
4 Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Netto)	F.2.4.4	(4.129.878.872)	(649.111.176)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		**88.761.873.212.786**	**20.042.387.123.266**
KENAIKAN/PENURUNAN KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN (A+B+C+D)		**108.138.052.149.887**	**150.600.854.175.217**
KOREKSI SILPA		1.496.864.847.086	9.137.971.841.987
PENYESUAIAN ATAS SELISIH KURS		(529.364.838.247)	3.676.340.697.318
PENDAPATAN BELUM TERIDENTIFIKASI			0
AKUMULASI KOREKSI PEMBUKUAN		(4.534.436.524.122)	(1.244.462.713.872)
PENGGUNAAN SAL		(35.000.000.000.000)	0
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN	F.1.2	69.571.115.634.604	162.170.704.000.650
SALDO AWAL KAS	F.1.1	536.443.156.881.227	374.272.452.880.577
SALDO AKHIR KAS	F.1.3	**606.014.272.515.831**	**536.443.156.881.227**

Jakarta, 20 Mei 2024
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara

Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(DALAM RUPIAH)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
A. EKUITAS AWAL	**G.2.1**	**(3.262.260.267.295.775)**	**(2.842.111.919.515.711)**
B. SURPLUS/DEFISIT LO	**G.2.2**	**(1.463.681.266.458.881)**	**(1.718.001.589.034.153)**
C. KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
1. Koreksi Nilai Persediaan	G.2.3.1	59.355.000	500.000
2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi	G.2.3.2	(4.984.035.702.940)	4.723.195.634.678
3. Mutasi Ekuitas Bersih Badan Lainnya	G.2.3.3	229.322.791.975	5.281.424.623.005
4. Koreksi SAL	G.2.3.4	1.498.554.940.209	9.431.660.376.686
5. Lain-lain	G.2.3.5	37.762.853.060.389	(20.785.248.684.369)
Jumlah Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas	**G.2.3**	**34.506.754.444.633**	**(1.348.967.550.000)**
D. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	**G.2.4**	**1.338.745.845.087.589**	**1.301.105.973.365.087**
E. KEUNTUNGAN / (KERUGIAN) SELISIH KURS YANG BELUM TEREALISASI	**G.2.5**	**-**	**-**
F. MUTASI EKUITAS BUN DI K/L			
1. Mutasi Kas Di Bendahara Pengeluaran		(18.216.293.568)	(32.123.110.511)
2. Mutasi Kas Lainnya Di K/L Dari Hibah		11.096.844.487.771	1.150.651.829.898
3. Mutasi Kas BLU		13.422.355.639.754	(3.022.293.280.385)
Jumlah Mutasi Ekuitas BUN Di K/L	**G.2.6**	**24.500.983.833.957**	**(1.903.764.560.998)**
G. KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS		**(65.927.683.092.702)**	**(420.148.347.780.064)**
EKUITAS AKHIR (A+B+C+D+E)	**G.2.7**	**(3.328.187.950.388.477)**	**(3.262.260.267.295.775)**

Jakarta, 20 Mei 2024
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara

Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang nomor 28 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2023
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara sebagimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023;
17. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa kewenangan Presiden dalam pengelolaan fiskal dikuasakan kepada Menteri Keuangan. Salah satu tugas Menteri Keuangan dalam menjalankan kewenangan pengelolaan fiskal *(Chief Financial Officer/CFO)* tersebut adalah melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara. Bendahara Umum Negara (BUN) adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. Tugas ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan fungsi BUN.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Menteri Keuangan selaku BUN berwenang untuk:

1. menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
2. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
3. melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;
4. menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;
5. menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;
6. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara;
7. menyimpan uang negara;
8. menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi;
9. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara;
10. melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;
11. memberikan pinjaman atas nama pemerintah;
12. melakukan pengelolaan utang dan piutang negara;
13. mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan;
14. melakukan penagihan piutang negara;
15. menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara;

16. menyajikan informasi keuangan negara;
17. menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan Barang Milik Negara;
18. menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak;
19. menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara.

Selain menjalankan fungsi dan kewenangan BUN tersebut di atas, Menteri Keuangan juga mendapat alokasi dana APBN yang hanya dikelola oleh BUN dan tidak dikelola oleh Kementerian Negara/Lembaga/Pihak Lain, yaitu Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN). Atas anggaran yang dikelola tersebut, Menteri Keuangan kemudian menunjuk Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) BUN untuk mengelola BA BUN serta Unit Kementerian Negara/Lembaga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BUN.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berkedudukan di ibukota negara yaitu Jakarta, dengan alamat Gedung Juanda I Jalan Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat.

Anggaran dan transaksi yang dikelola Menteri Keuangan selaku BUN meliputi transaksi:

1. Utang Pemerintah terdiri dari:
    a. Penerimaan utang luar negeri;
    b. Penerimaan utang dalam negeri;
    c. Pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri;
    d. Pembayaran cicilan utang luar negeri;
    e. Pembayaran cicilan utang dalam negeri;
2. Hibah terdiri dari:
    a. Hibah dalam bentuk uang;
    b. Hibah dalam bentuk barang, jasa, dan/atau surat berharga;
3. Investasi Pemerintah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan terkait Investasi Pemerintah, yang antara lain meliputi penyertaan modal negara, Investasi pada lembaga keuangan internasional, pembiayaan untuk badan layanan umum, Investasi nonpermanen pada badan hukum lainnya, dana penjaminan serta pemberian pinjaman kepada badan usaha dan/atau pemerintah daerah.
4. Pemberian Pinjaman yaitu transaksi pemberian pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, BUMN, dan/atau BUMD yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu ;
5. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Transaksi TKD meliputi beban dan realisasi TKD, piutang TKD, kewajiban TKD dan transaksi transitoris TKD.

    TKD terdiri atas:

    a. Dana Bagi Hasil (DBH);

b. Dana Alokasi Umum (DAU);
c. Dana Alokasi Khusus (DAK);
d. Dana Otonomi Khusus;
e. Dana Keistimewaan;
f. Dana Desa;
g. Insentif Fiskal.

6. Belanja Subsidi yaitu pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/ jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.;
7. Belanja Lain-lain yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah pusat/daerah;
8. Transaksi Khusus antara lain meliputi transaksi:
   a. belanja/beban pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional
   b. belanja/beban Fasilitas Penyiapan Proyek
   c. belanja/beban Dukungan Kelayakan
   d. PNBP yang dikelola oleh DJA
   e. transaksi aset dan belanja/beban yang berada dalam pengelolaan DJKN
   f. belanja/beban jaminan sosial, belanja/beban selisih harga beras Perum Bulog, dan pelaporan akumulasi iuran pensiun
   g. pendapatan dan belanja/beban pengelolaan kas negara
   h. transaksi penggunaan PNBP BUN PKN
   i. utang perhitungan fihak ketiga pegawai
   j. utang perhitungan fihak ketiga Pajak Rokok
   k. pendapatan dan beban untuk pengelolaan penerimaan negara
   l. belanja/beban pengeluaran untuk keperluan layanan perbankan
   m. pendapatan dan beban untuk pengelolaan rekening valuta asing pada kuasa BUN daerah.
9. Badan Lainnya yaitu transaksi pada Badan Lainnya (yayasan dan lembaga non struktural) baik yang melalui APBN maupun yang tidak melalui mekanisme APBN;

Pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan Menteri Keuangan selaku BUN di atas dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawabannya telah ditetapkan Kode Bagian Anggaran BUN (BABUN) yaitu BA 999.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun Laporan Arus Kas (LAK). Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas

Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Entitas Pelaporan terdiri dari:

1. Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Daerah;
3. Kementerian Negara/Lembaga; dan
4. Bendahara Umum Negara.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan tugas BUN serta sesuai ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Menteri Keuangan selaku BUN merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dihasilkan dari Sistem Akuntansi BUN (SA-BUN). Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (LK BABUN) dan Laporan Keuangan Kuasa BUN yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) beserta Catatan atas Laporan Keuangan.

LAK merupakan Laporan Keuangan yang menginformasikan penerimaan/pengeluaran kas ke/dari kas negara. LAK tidak terkait dengan BA tertentu tetapi mencakup seluruh Bagian Anggaran. Berdasarkan PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang selanjutnya akan dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

SA-BUN terdiri dari beberapa subsistem, yaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SA-UP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (SIKUBAH), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SA-IP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemberian Pinjaman (SA-PPP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah (SA-TD), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (SA-BS), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain (SA-BL), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SA-TK), dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (SA-PBL).

Dalam rangka pelaksanaan SA-BUN, Menteri Keuangan selaku BUN membentuk unit akuntansi dan pelaporan berupa Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN (UAPBUN) pada unit eselon I terkait pada Kementerian Keuangan. Khusus untuk SATK, karena UAPBUN TK tersebar pada beberapa unit eselon I, Menteri Keuangan menetapkan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu BUN Transaksi Khusus (UAKP BUN TK). Setiap UAPBUN membawahi satu atau lebih Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran BUN (UAKPA BUN) dan/atau Unit Akuntansi Kuasa BUN (UAKBUN). Struktur organisasi akuntansi dan penanggung jawab untuk setiap subsistem SA-BUN diatur pada masing-masing subsistem SA-BUN. Dalam rangka proses konsolidasi laporan keuangan BUN, Menteri Keuangan membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUN (UA BUN). Selain itu dalam kerangka SiAP, Menteri Keuangan selaku BUN juga menunjuk Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN. Fungsi Kuasa BUN pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilaksanakan oleh

Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) selaku Kuasa BUN Pusat dan KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah.

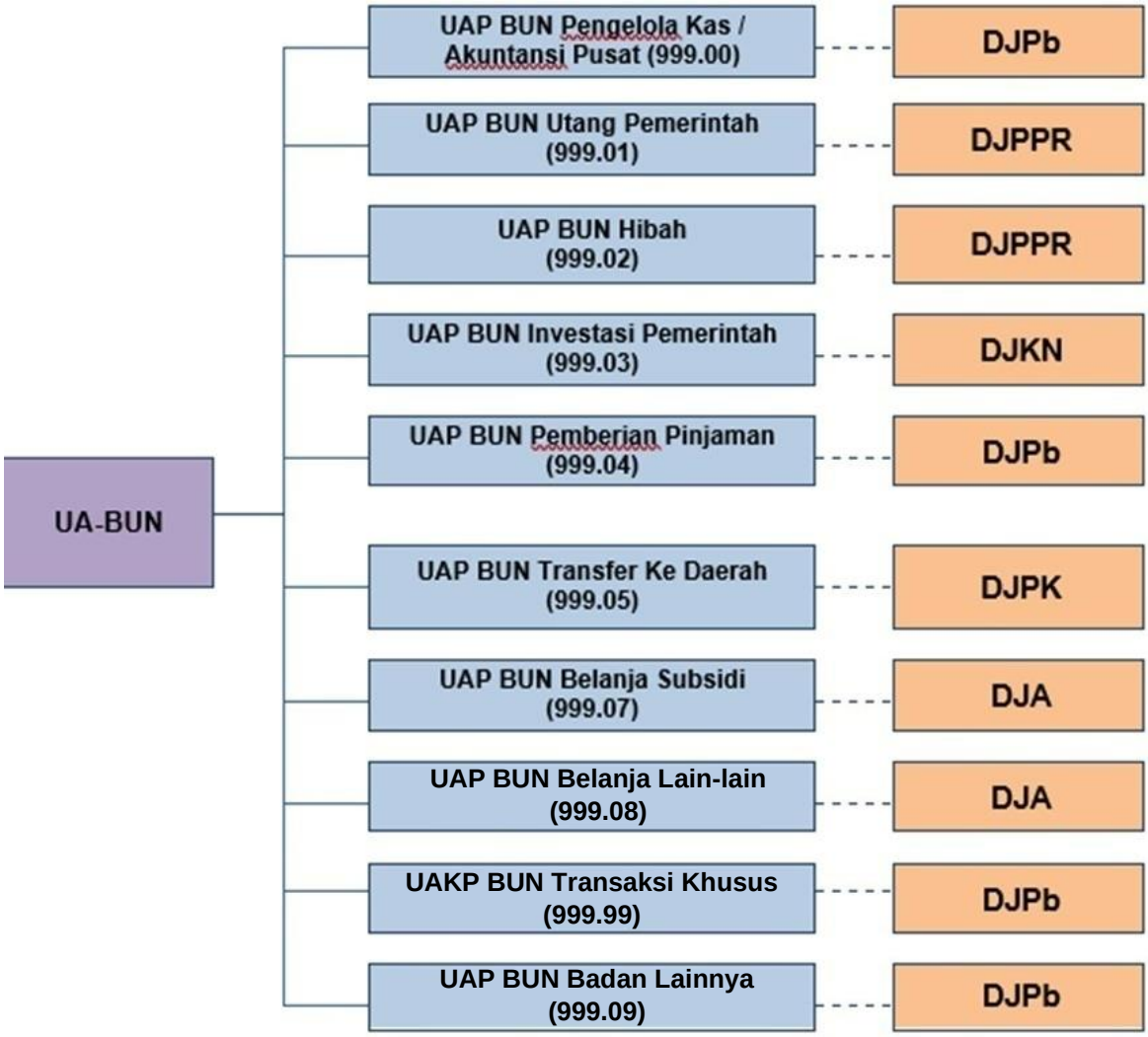

Berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan oleh UAPBUN, UAKP BUN TK, dan UAK BUN Pusat dan Daerah, UA BUN melakukan proses konsolidasi setiap semester dan tahunan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang dilaksanakan dengan cara menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari masing-masing laporan serta melakukan eliminasi terhadap akun timbal balik (*reciprocal accounts*).

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2023 merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu BUN yang disajikan per 31 Desember 2023, yang meliputi:

No.	BA	Uraian	Jumlah Satker
1	999.00	UAPBUN Akuntansi Pusat (UAPBUN AP)	184
2	999.01	BA BUN Pengelola Utang Pemerintah (DJPPR)	1
3	999.02	BA BUN Pengelola Hibah (DJPPR)	2
4	999.03	BA BUN Pengelola Investasi (DJKN)	18
5	999.04	BA BUN Pengelola Pemberian Pinjaman (DJPb)	1
6	999.05	BA BUN Pengelola Transfer ke Daerah (DJPK)	520
7	999.07	BA BUN Pengelola Belanja Subsidi (DJA)	14
8	999.08	BA BUN Pengelola Belanja Lain-lain (DJA)	14

No.	BA	Uraian	Jumlah Satker
9	999.99	Transaksi Khusus (DJPb)	34
10	999.09	Badan Lainnya: Yayasan dan LNS*) (DJPb)	1
Total Satuan Kerja			789

Dengan demikian, selaku UABUN/entitas pelaporan adalah Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Sedangkan anggaran dan transaksi BA-BUN dilaksanakan oleh Unit Eselon I di Kementerian Keuangan yang sekaligus sebagai Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN)/entitas akuntansi.

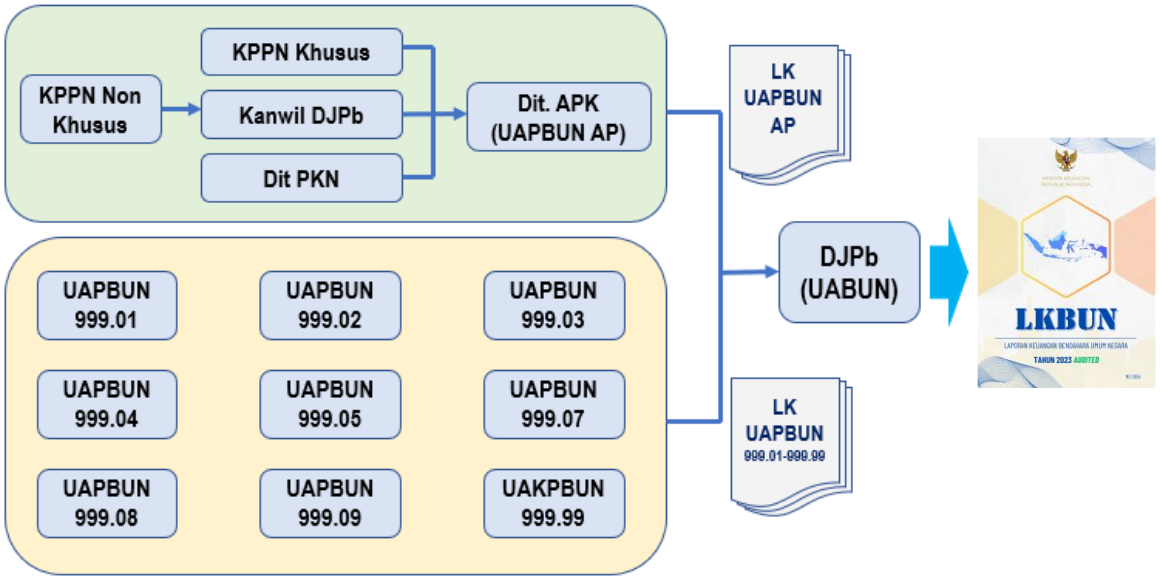

KEBIJAKAN PENYUSUNAN LKBUN Tahun 2023 *Audited*

Laporan Keuangan Kuasa BUN Daerah yang disusun oleh KPPN dan Laporan Keuangan Kuasa BUN Pusat yang disusun oleh Direktorat PKN merupakan bagian tak terpisahkan dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Dalam Laporan Keuangan *Tahun 2023 Audited*, penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN menggunakan aplikasi SPAN.

Kebijakan penyajian LK Kuasa BUN Tingkat KPPN secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penerimaan dan pengeluaran kas yang melalui rekening Kuasa BUN Daerah;
2. Penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak melalui Rekening Kuasa BUN Daerah namun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus mendapatkan penihilan/pengesahan dari KPPN; dan/atau
3. Penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak melalui rekening Kuasa BUN Daerah namun mempengaruhi Neraca UAKBUN Daerah.

Kebijakan penyajian UAKBUN-Pusat Direktorat PKN secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penerimaan dan pengeluaran kas yang melalui rekening Kuasa BUN Pusat; dan
2. Penerimaan dan pengeluaran pada SPM atau dokumen yang dipersamakan, dengan potongan, yang pembayarannya melalui rekening Kuasa BUN Pusat.

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2023 *Audited* disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara sebagimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 221/PMK.05/2016;
2. Peraturan Menteri Keuangan nomor 173 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat;
3. Peraturan Menteri Keuangan nomor 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Keuangan nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
5. Peraturan Menteri Keuangan nomor 174 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan nomor 179/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman Pinjaman;
7. Peraturan Menteri Keuangan nomor 229/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan nomor 179/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain;
9. Peraturan Menteri Keuangan nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya;
10. Peraturan Menteri Keuangan nomor 175 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara disusun dengan menggunakan mata uang Rupiah.

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

   LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRABUN disusun berdasarkan LRA yang disampaikan oleh UAPBUN dan UAKP BUN TK dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. LRA Pendapatan menyajikan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan negara dan hibah. Dalam hal terdapat transaksi pengembalian pendapatan tahun anggaran berjalan, mengurangi realisasi pendapatan tahun anggaran berjalan. LRA Pendapatan disusun oleh UAPBUN selaku pengguna anggaran BUN. UABUN menerima LRA dari seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK kecuali UAPBUN AP dengan menjumlahkan pos-pos yang sama pada LRA seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK. Dalam rangka penyajian LRA Konsolidasian BUN, UABUN menyajikan pos-pos pendapatan berdasarkan pos-pos pendapatan yang disajikan pada LRA UAPBUN.

   b. LRA Belanja dan Transfer menyajikan informasi mengenai anggaran dan realisasi belanja dan transfer. Dalam hal terdapat transaksi pengembalian belanja dan transfer tahun anggaran

berjalan, mengurangi realisasi belanja dan transfer tahun anggaran berjalan. LRA Belanja dan Transfer disusun oleh UAPBUN selaku pengguna anggaran BUN. UABUN menerima LRA dari seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK kecuali UAPBUN AP. UABUN menjumlahkan nilai pos-pos yang sama pada seluruh UAPBUN dan LRA UAKPBUN TK selain UAPBUN AP. Dalam rangka penyajian LRA Konsolidasian BUN, UABUN menyajikan pos-pos belanja berdasarkan pos-pos belanja yang disajikan pada LRA UAPBUN dan UAKPBUN TK selain UAPBUN AP.

c. LRA Pembiayaan menyajikan informasi mengenai anggaran dan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam hal terdapat transaksi pengembalian pembiayaan, mengurangi realisasi pembiayaan tahun anggaran berjalan. LRA Pembiayaan disusun oleh UAPBUN yang melaksanakan aktivitas pembiayaan maupun oleh UAPBUN selaku pengelola kas negara (UAPBUN AP). UABUN menerima LRA dari seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK. UABUN menjumlahkan nilai pos-pos yang sama pada LRA seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK.

d. Penyajian SiLPA/SiKPA dalam LRA BUN berisi selisih antara pendapatan BA BUN, belanja BA BUN, dan pembiayaan BA BUN.

2. Neraca

Neraca menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca disusun oleh seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK. UABUN menyusun neraca dengan menjumlahkan nilai pos-pos yang sama pada neraca seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK. Dalam hal terdapat pos-pos neraca yang disajikan ganda antara UAPBUN dan UAPBUN AP dilakukan pengurangan pada neraca UAPBUN agar tidak terjadi duplikasi penyajian. Dalam hal terdapat realisasi pos-pos neraca yang bersifat *reciprocal*, dilakukan eliminasi *(reciprocal elimination).*

3. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang meliputi data penerimaan dan pengeluaran kas melalui Rekening Kas Umum Negara, Subrekening Kas Umum Negara, Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih, Rekening Kas Penempatan, Rekening Khusus, Rekening Penerimaan, dan Rekening Pengeluaran termasuk transaksi pendapatan dan belanja operasional pada BLU. UAPBUN AP menyusun LAK dengan menjumlahkan pos-pos yang sama pada LAK seluruh UAKBUN Daerah dan UAKBUN Pusat.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah sampai dengan periode 31 Desember 2023. Laporan Operasional disusun berdasarkan data pendapatan dan beban atas kegiatan operasional serta kegiatan nonoperasional yang dilakukan oleh seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK kecuali UAPBUN AP. Dalam rangka penyajian Laporan Operasional Konsolidasian BUN, UABUN menyajikan pos-pos Laporan Operasional berdasarkan hasil konsolidasi pos-pos Laporan Operasional yang disajikan pada Laporan Operasional seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK.

5. Laporan Perubahan Ekuitas

   Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas disusun berdasarkan data ekuitas akhir tahun lalu yang merupakan ekuitas awal tahun berjalan ditambah surplus/defisit yang dihasilkan oleh Laporan Operasional ditambah koreksi karena dampak kumulatif kebijakan akuntansi dan transaksi antar entitas.

6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

   Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKBUN, penjelasan, daftar terinci, atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi APBN disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun berdasarkan basis akrual yaitu pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi dan pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Penyusunan dan penyajian LKBUN *Tahun 2023 Audited* mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual). Dengan demikian, dalam penyusunan LKBUN telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKBUN ini adalah:

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar

kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN atau pada saat pengesahan pendapatan oleh BUN. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Pengecualian terhadap asas bruto pada penyusunan LKBUN *Tahun 2023 Audited* adalah untuk penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung dalam rekening antara (rekening 600.000.411980) dan penerimaan panas bumi (rekening 508.000.084980). Hal ini dilandasi bahwa *earnings process* atas penerimaan migas dan panas bumi tersebut belum selesai, karena penerimaan migas pada rekening 600.000.411980 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000.084980 masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti *under/over lifting, DMO fee*, dan pengembalian *(reimbursement)* PPN dan PBB. Penerimaan migas pada rekening 600.000.411980 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000.084980 diakui sebagai "Pendapatan yang Ditangguhkan". Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, baru kemudian disetor ke Kas Negara sebagai penerimaan negara (PNBP).

Pendapatan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran BUN merupakan data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN berupa realisasi pendapatan pada seluruh UAPBUN dan UAKP BUN TK.

Sedangkan data realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dari UAPBUN AP berfungsi sebagai penguji (kontrol) data realisasi BA BUN.

SiLPA/SiKPA dalam LRA BUN merupakan selisih antara pendapatan BA BUN, belanja BA BUN, dan pembiayaan BA BUN.

2. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah dalam hal ini UAPBUN yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak tagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (atau tidak setelah dikompensasikan dengan pengeluarannya). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN atau pada saat pengesahan belanja oleh BUN. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan pada muka lembar*(face)* laporan keuangan menurut klasifikasi

ekonomi/jenis belanja.

Belanja yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran merupakan gabungan dari seluruh belanja Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN selaku pengguna anggaran BUN dan Unit Akuntansi Koordinator Pembantu BUN TK.

Untuk transaksi pengembalian pendapatan dan pengembalian belanja tahun berjalan, menggunakan mata anggaran (akun) yang sama dengan mata anggaran (akun) realisasinya, tetapi dibedakan dalam penggunaan dokumen sumber. Jika terjadi pengembalian pendapatan/belanja pada tahun anggaran berjalan, maka langsung mengurangi realisasi pendapatan/belanja dengan mata anggaran pendapatan/belanja yang berkenaan.

SiLPA/SiKPA dalam LRA BUN merupakan selisih antara pendapatan BA BUN, belanja BA BUN, dan pembiayaan BA BUN.

4. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat: (1) terjadinya penurunan manfaat ekonomi; (2) potensi jasa atau terjadinya konsumsi aset; (3) timbulnya kewajiban.

Pengakuan Beban karena penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Pengakuan beban karena konsumsi aset adalah saat terjadinya pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Pengakuan beban karena timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beban yang disajikan pada Laporan Operasional merupakan gabungan dari seluruh beban Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN selaku pengguna anggaran BUN dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu BUN TK.

5. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada KUN serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari KUN. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran), meskipun penyajian dalam LKBUN secara neto. Penyajian pagu anggaran pembiayaan menggunakan data yang bersumber dari pagu APBN dan APBN-P.

Nilai pembiayaan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilan pokok atas pinjaman luar negeri yang disajikan baik pada Laporan Realisasi APBN maupun Laporan Arus Kas berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku

BUN (data Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN). Sementara itu, saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca LKBUN berdasarkan saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca Bagian Anggaran 999.01 (Pengelolaan Utang) oleh Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Perbedaan data penarikan pinjaman luar negeri antara Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN dan Ditjen Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Kuasa Pengguna Anggaran dijelaskan pada CaLK.

6. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

7. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika berupa kas dan setara kas serta diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs penutup yaitu kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang persediaan (UP) yang belum disetorkan ke kas negara atau belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal pelaporan. Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan dalam Neraca LKBUN menggunakan data Kas Bendahara Pengeluaran menurut data KPPN yang telah diverifikasi dengan data Kementerian Negara/Lembaga.

Kas Lainnya dan Setara Kas dapat berupa bunga dan jasa giro atas rekening Bendahara Pengeluaran, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, serta kas penerimaan hibah dan dana yang berasal dari SPM-LS Bendahara Pengeluaran yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga.

Kas pada BLU merupakan Saldo Kas pada BLU yang telah disahkan pendapatan dan belanja ke KPPN, tidak termasuk pendapatan dan belanja BLU yang belum disahkan ke KPPN.

Kas di BLU yang merupakan dana kelolaan yang belum digulirkan/diinvestasikan disajikan

sebagai Aset Lainnya.

Kas di Kementerian Negara/Lembaga merupakan Saldo Kas yang berada di Kementerian Negara/Lembaga yang berasal dari pengesahan hibah dalam bentuk uang yang langsung diterima oleh Kementerian Negara/Lembaga.

Transaksi penerimaan kas dapat berupa:

1) Transaksi Pendapatan

   Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2) Transaksi Penerimaan Pembiayaan

   Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lain, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan negara/daerah yang dipisahkan.

3) Transaksi Penerimaan Lainnya / Non Anggaran

   Penerimaan Negara/Daerah lainnya adalah penerimaan kas yang tidak mempengaruhi pendapatan, penerimaan pembiayaan, dan penerimaan transfer pemerintah, antara lain berupa penerimaan perhitungan pihak ketiga.

Transaksi pengeluaran kas dapat dipengaruhi oleh:

1) Transaksi Belanja Negara/Daerah

   Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2) Transaksi Pengeluaran Pembiayaan

   Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

3) Transaksi Pengeluaran Transfer

   Pengeluaran transfer atau transfer keluar adalah pengeluaran kas dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain dalam pemerintahan seperti pengeluaran dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus oleh pemerintah pusat.

4) Transaksi Pengeluaran Lainnya/Non Anggaran

   Pengeluaran Lainnya/Non Anggaran adalah pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, pengeluaran pembiayaan, dan pengeluaran transfer pemerintah, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah

dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Temasuk dalam pos Piutang adalah Piutang PNBP, Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), dan piutang lainnya yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam piutang lainnya adalah piutang bunga atas pemberian pinjaman Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah (RDI/RPD).

Pada LKBUN *Tahun 2023 Audited* ini, Piutang yang disajikan antara lain Piutang Bukan Pajak BA-BUN, Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman, dan Uang Muka Belanja.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat pada neraca berdasarkan:

1) harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian,
2) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
3) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, BMN berupa persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaannya namun belum mendapatkan persetujuan pemindahtanganan, dikecualikan dari ketentuan pelaksanaan opname.

b. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka pendek termasuk dalam kelompok aset lancar. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Penyajian investasi pada Neraca per 31 Desember 2023 terbatas pada investasi jangka panjang.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

1) Investasi Non Permanen

   Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

   Investasi Non Permanen meliputi seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok

Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP), atau nasabah BPR.

LKBUN *Tahun 2023 Audited* menyajikan Investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir pada BLU Kementerian/Lembaga yang pendanaan Dana Bergulir berasal dari BA 999.03 (Investasi Pemerintah). Selain itu LKBUN juga menyajikan Investasi Non Permanen Lainnya pada Kementerian Perindustrian dan Lembaga Manajemen Aset Negara Kementerian Keuangan.

Dana kelolaan BLU yang masih berupa kas dan belum digulirkan/ diinvestasikan disajikan sebagai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan pada pos Aset Lainnya.

Penilaian Investasi Non Permanen Lainnya menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan dan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat, misalnya dana bergulir.

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha yang sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PMN pada badan usaha yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN. Termasuk dalam investasi permanen adalah nilai ekuitas (kekayaan bersih) Bank Indonesia (BI).

PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Aset-aset yang berstatus Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN. Aset-aset yang berstatus BPYBDS telah dikeluarkan dari neraca LKKL.

Penyertaan Pemerintah pada lembaga internasional dicatat sebagai investasi permanen sebesar kontribusi Pemerintah yang telah dibayar tunai maupun dalam bentuk penerbitan *Promissory Notes*. Di sisi lain, *Promissory Notes* tersebut disajikan sebagai kewajiban.

Nilai PMN pada BUMN/BHMN dengan persentase kepemilikan sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen disajikan dengan menggunakan metode ekuitas *(*equity *method).* Nilai PMN pada perusahaan minoritas (Non BUMN) dengan kepemilikan 20 (dua puluh) persen atau lebih disajikan dengan menggunakan metode ekuitas *(equity method)*, sedangkan kepemilikan kurang dari 20 (dua puluh) persen menggunakan metode biaya *(cost method).*

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan *(net realizable value)*. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non*

earning asset atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

Dalam penilaian investasi permanen pada BUMN, terdapat penilaian yang dilakukan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang disusun berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia (PABU).

c. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dan siap digunakan.

Aset Tetap dilaporkan berdasarkan neraca UAPBUN/UAKPBUN TK per 31 Desember 2023 pada harga perolehan.

Sesuai ketentuan pasal 40 ayat (40 dan (5) Peraturan Menteri Keuangan nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2018 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah), dan
2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas tidak dikapitalisasi sebagai penambah nilai aset (diperlakukan sebagai biaya), kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Nilai satuan minimum kapitalisasi juga dikecualikan terhadap aset tetap yang diperoleh dari transfer/pengalihan/pertukaran.

Pengeluaran yang memenuhi batasan minimum kapitalisasi diperlakukan sebagai penambah nilai Aset Tetap.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan lampiran IPSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Dalam LKBUN *Tahun 2023 Audited*, seluruh aset tetap yang dikelola oleh UAPBUN selaku pengguna barang telah disusutkan/didepresiasi. Kebijakan akuntansi umur ekonomis dan nilai buku aset secara nasional sebagai dasar penyusutan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Selain berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017, terdapat beberapa aset dalam pengelolaan BA BUN yang tata cara penyusunannya diatur tersendiri. Pengaturan khusus tersebut meliputi:

1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 188/PMK.05/2022 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Kerja sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 207/PMK.05/2022 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi;
3) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Nomor PER-1/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusutan BMN yang berasal dari KKKS berupa Aset Lainnya pada Laporan Keuangan Transaksi Khusus Bendahara Umum Negara;
4) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Nomor PER-08/KN/2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusutan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Aset Eks Pertamina.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan Tagihan TGR yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar (Lihat Kebijakan Akuntansi pada Aset Lancar).

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti rekening cadangan subsidi/PSO, rekening cadangan Dana Bagi Hasil, rekening dana reboisasi, serta dana lain yang sejenis.

Aset Tak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset Lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) dan Tim Koordinasi, dan aset pemerintah yang digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) minyak dan gas bumi. Di samping itu, piutang macet

Kementerian Negara/Lembaga yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

Aset KKKS yang disajikan pada LKBUN *Tahun 2023 Audited* adalah aset KKKS yang telah dilakukan inventarisasi dan penilaian yang belum diserahkan kepada Pemerintah. Aset KKKS yang belum diserahkan dan belum dilakukan inventarisasi dan penilaian tidak dicatat dalam neraca, namun diungkapkan dalam CaLK. Aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah c.q Kementerian ESDM dan sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian, dicatat dalam neraca sebagai aset tetap atau persediaan.

Terhadap pengakuan Aset KKKS sebagai Aset Lain-lain, Pemerintah tidak mengakui adanya kewajiban atas pengakuan aset tersebut. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dibeli Kontraktor menjadi Milik/Kekayaan Negara. Dengan demikian, Pemerintah tidak mengakui adanya kewajiban atas pengakuan Aset KKKS.

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah dana kelolaan BLU yang masih berupa kas yang belum digulirkan dan piutang pemberian pinjaman yang berasal dari Naskah Perjanjian Pemberian Pinjaman (NPPP) tahun 2009 dan setelah tahun 2009.

Terkait dengan pelaporan Badan Lainnya diantaranya Otorita Asahan, Yayasan Gedung Veteran, dan Taman Mini Indonesia Indah disajikan sebagai Aset Lainnya dari Ekuitas Pada Unit Badan Lainnya.

8. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga/Biaya Pinjaman *(accrued interest)*, Utang Subsidi, Utang SBN Jangka Pendek, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Utang SBN Jangka Pendek adalah instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto yang berjangka waktu kurang dari 12 bulan. Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal tanggal pelaporan disajikan sebagai bagian lancar.

Termasuk juga bentuk utang kepada pihak ketiga adalah kewajiban pemerintah kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan

kebutuhan energi yang dalam pelaksanaannya, terdapat selisih kurang antara penerimaan (harga jual) dengan biaya produksinya.

Pengakuan Utang Kompensasi Jangka Pendek:

Kewajiban kompensasi kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan energi diakui pada saat:

1) terdapat kekurangan penerimaan badan usaha berdasarkan perhitungan badan usaha yang telah diverifikasi/ diaudit oleh instansi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah; dan/ atau
2) penetapan besaran final nilai kompensasi oleh pemerintah.

Penetapan besaran final nilai kompensasi oleh pemerintah menjadi dasar penyesuaian atas nilai kompensasi sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan badan usaha yang telah diverifikasi/ diaudit oleh instansi yang di tunjuk.

Dalam hal besaran final nilai kompensasi ditetapkan akan dibayarkan lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka kewajiban kompensasi diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang-utang jangka panjang lainnya.

Pengukuran Utang Kompensasi Jangka Pendek:

Kewajiban pemerintah kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan energi diakui sebesar:

1) kekurangan penerimaan badan usaha berdasarkan perhitungan badan usaha yang telah diverifikasi/ diaudit oleh instansi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah; dan/ atau
2) besaran final nilai kompensasi yang ditetapkan oleh pemerintah

Termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah kewajiban Pemerintah terkait dengan penerimaan migas yang masuk ke rekening 600.000.411980 dan 508.000.084980, seperti *under lifting, DMO fee*, dan pengembalian *(reimbursement)* PPN dan PBB, yang akan dibayarkan kepada kontraktor kontrak kerjasama berdasarkan verifikasi yang dilakukan Pemerintah bersama SKK Migas.

Estimasi Kurang Bayar Tagihan Belanja Subsidi

Kewajiban subsidi diestimasi merupakan tagihan kurang pembayaran belanja subsidi kepada pemerintah yang diakui saat KPA BUN belanja subsidi menetapkan nilai estimasi kewajiban kurang bayar belanja subsidi atau dokumen yang dipersamakan. KPA tetap memperhatikan nilai yang andal terkait derajat kepastian estimasi kewajiban berdasarkan asas konservatif harus dilaporkan. Derajat kepastian nilai estimasi kewajiban belanja subsidi dapat disusun dalam kertas kerja yang didukung dengan data sumber yang andal

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang Luar Negeri Pemerintah adalah pinjaman program dan pinjaman proyek yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Utang jangka panjang pemerintah dapat bersumber dari sumber pinjaman dan sumber penerbitan SBN Jangka Panjang.

Utang jangka panjang dari sumber pinjaman diakui pada saat tanggal valuta (value date) sebagaimana tercantum dalam *Notice of Disbursement (NoD)*, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan yang tercantum dalam NoD. Nilai utang jangka panjang dari sumber pinjaman disajikan sebagai utang jangka panjang di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang.

Utang jangka panjang dari sumber pinjaman menggunakan mata uang asing dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam PMK No. 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah.

Utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN Jangka Panjang diakui pada saat tanggal setelmen yang tercantum dalam dokumen setelmen, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan hasil ketetapan penerbitan SBN. Nilai utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN disajikan sebagai utang jangka panjang di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang.

Utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN yang menggunakan mata uang asing dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal setelmen sesuai dengan hasil ketetapan penerbitan SBN.

Pada setiap periode pelaporan semesteran dan tahunan, saldo posisi (outstanding) utang jangka panjang dari sumber pinjaman dan utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN Jangka Panjang yang menggunakan mata uang asing yang telah dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah, dilakukan penyesuaian dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca pelaporan semesteran dan tahunan.

Penyesuaian atas penjabaran nilai rupiah utang jangka panjang pada periode semesteran dan tahunan dapat menghasilkan nilai perhitungan selisih kurs belum terealisasi yang dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi dan mempengaruhi penurunan nilai saldo utang dalam penjabaran rupiah atau beban selisih kurs belum terealisasi yang mempengaruhi penambahan nilai saldo utang dalam penjabaran rupiah. Nilai pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi disajikan di LO dalam pos kegiatan nonoperasional lainnya.

Utang jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang Luar Negeri Pemerintah adalah pinjaman program dan pinjaman proyek yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Utang bunga atas utang Pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis.

Termasuk dalam kelompok kewajiban adalah *Promissory Notes* yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka keanggotaan pada lembaga internasional. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar kurang dari 1 (satu) tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar lebih dari 1 (satu) tahun disajikan sebagai kewajiban jangka panjang.

c. Konversi Pinjaman

Konversi pinjaman merupakan strategi Direktorat Jenderal Pengelola Pinjaman dan Risiko (DJPPR) selaku BA BUN 999.01 dalam melakukan pengelolaan portofolio utang pemerintah yang berasal dari penarikan pinjaman.

Konversi pinjaman sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pertukaran atau konversi yang disetujui oleh pemberi pinjaman (kreditur) dengan memanfaatkan tingkat suku bunga yang rendah untuk pinjaman dan/atau disertai dengan konversi mata uang asing lama dengan mata uang asing baru yang disepakati.

Pada saat tanggal pelaksanaan konversi pinjaman, dapat mengakibatkan selisih lebih atau kurang perhitungan hasil pelaksanaan konversi pinjaman yang mempengaruhi nilai outstanding pinjaman dalam mata uang asing baru terkonversi maupun penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah.

Selisih lebih perhitungan hasil pelaksanaan konversi pinjaman merupakan nilai outstanding pinjaman yang belum terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah lebih besar dari nilai outstanding pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah, sehingga nilai outstanding pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah menjadi lebih besar dari semula.

Selisih kurang perhitungan hasil pelaksanaan konversi pinjaman merupakan nilai outstanding pinjaman yang belum terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah lebih kecil dari nilai outstanding pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah, sehingga nilai outstanding pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah menjadi lebih kecil dari semula.

Dalam hal hasil pelaksanaan konversi pinjaman menghasilkan selisih lebih perhitungan, maka nilai selisih lebih perhitungan dicatat sebagai beban penyesuaian untuk disajikan di Laporan Operasional menggunakan akun 596611 (Beban Lain-lain) dan menambah nilai outstanding utang jangka panjang pinjaman terkait di Neraca.

Dalam hal hasil pelaksanaan konversi pinjaman menghasilkan selisih kurang perhitungan, maka nilai selisih kurang perhitungan dimaksud dicatat sebagai pendapatan penyesuaian untuk disajikan di Laporan Operasional menggunakan akun 491311 (Pendapatan Penyesuaian Lainnya) dan mengurangi nilai outstanding utang jangka panjang pinjaman terkait di Neraca.

UAKPA BUN 999.01 melakukan penjelasan yang memadai di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terhadap penyajian akun 491311 (Pendapatan Penyesuian Lainnya) dan/atau akun

596611 (Beban Lain-lain) di Laporan Operasional yang timbul dari pelaksanaan konversi pinjaman, paling sedikit memuat informasi mengenai:

1) identitas pinjaman (loan ID) yang menjadi obyek konversi pinjaman;
2) perubahan tingkat suku bunga yang menjadi obyek konversi pinjaman; dan
3) kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaksanaan konversi pinjaman.

9. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena (i) tidak terdapat kemungkinan besar *(not probable)* suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau (ii) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Kewajiban kontijensi belum diatur secara khusus dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dengan PSAP tersendiri, tetapi di dalam PSAP No. 4 tentang Catatan atas Laporan Keuangan paragraf 58 sampai dengan 62 sudah mensyaratkan bahwa kewajiban kontijensi perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Utang kontinjensi pemerintah yang bersifat eksplisit seperti jaminan Pemerintah terhadap pembayaran kewajiban PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada kreditur yang menyediakan pendanaan kredit ekspor untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya.

10. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam Basis Akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

11. Kurs Valuta Asing

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan lampiran I dijelaskan sebagai berikut:

a. Paragraf 99 Kerangka Konseptual Lampiran I PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP menyebutkan bahwa “Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah”.

b. Paragraf 74 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan Lampiran I PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP menyebutkan bahwa: “Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca”.

c. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 63-66 Lampiran I PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP, menyebutkan bahwa:

1) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.

2) Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

3) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.

4) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

a) transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; dan

b) transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

d. PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas Paragraf 43-45 Lampiran I PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP, menyebutkan bahwa:

1) Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

2) Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

3) Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

e. PSAP 12 tentang Laporan Operasional Paragraf 53-56 Lampiran I PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP, menyebutkan bahwa:

1) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.

2) Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

3) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.

4) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi

b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara *Tahun 2023 Audited*, transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Hal ini disebabkan Pemerintah memiliki rekening dalam mata uang asing di BI, sehingga dalam melakukan transaksi Pemerintah tidak harus membeli mata uang asing yang bersangkutan.

Dalam satu hari, Bank Indonesia menerbitkan dua publikasi kurs, sebagai berikut:

a) Kurs Khusus Pemerintah (kurs tengah yang terbit pada pukul 08.00 WIB) merupakan kurs tengah pada H-1 yang diterbitkan oleh BI pada pukul 16.15 WIB. Kurs tersebut dihitung berdasarkan transaksi mata uang asing terhadap rupiah antar bank yang terjadi di pasar valuta asing Indonesia yang terjadi pada H-1;
b) Kurs Penutup (kurs tengah yang terbit pada pukul 16.15 WIB) merupakan kurs yang dihitung berdasarkan transaksi mata uang asing terhadap rupiah antar bank yang terjadi di pasar valuta asing Indonesia yang terjadi pada hari berkenaan. Kurs penutup (H+0) tersebut akan secara otomatis menjadi kurs tengah pada H+1 pukul 08.00 WIB.

Rekening koran yang dihasilkan oleh system pada BI mencatat transaksi harian menggunakan kurs tengah yang terbit pada pukul 08.00 WIB. Namun, transaksi tersebut akan direvaluasi berdasarkan kurs tengah yang diperbaharui datanya pada pukul 16.15 WIB. Revaluasi tersebut dilakukan ketika BI telah melakukan tutup buku/*End of Day (EoD)*. Oleh karena itu, kurs tengah yang digunakan sebagai referensi kurs acuan dalam konversi nilai valuta asing ke nilai ekuivalen rupiah untuk keperluan penyajian laporan keuangan menggunakan kurs tengah pada tanggal pelaporan yang datanya diperbaharui setiap pukul 16.15 WIB yang kemudian disebut sebagai kurs penutup.

Setiap pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs penutup yaitu kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Pada tahun 2021 terjadi perubahan kebijakan penggunaan kurs BI yang digunakan sebagai acuan penjabaran nilai mata uang asing di tanggal pelaporan. Perubahan kebijakan tersebut merujuk pada kebijakan BI yang mempublikasikan kurs penutup sebagai kurs untuk keperluan pelaporan. Kebijakan akuntansi terkait penggunaan kurs penutup BI pada entitas lingkup BUN diatur dalam Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-258/PB/2021 tanggal 22 Juli 2021 hal Kebijakan Akuntansi atas penggunaan Kurs Penutup pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Selisih penjabaran pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan atau selisih kurs belum terealisasi (*unrealized*). Dengan demikian LKBUN *Tahun 2023 Audited* menyajikan selisih kurs belum terealisasi atas kas dan utang kepada pihak ketiga dalam mata uang asing, bagian lancar pemberian pinjaman, utang luar negeri, pemberian pinjaman, utang jangka panjang luar negeri, dan SBN Valas sebagai pendapatan/kerugian selish kurs yang belum terealisasi pada Laporan Operasional, kenaikan/penurunan ekuitas pada Neraca, dan penyesuaian pada Laporan Arus Kas.

Kurs penutup BI tanggal 31 Desember 2023 dan kurs penutup BI tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Mata Uang Asing	Satuan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Dolar Amerika Serikat [USD]	1	15.439,00	15.592,00
Dolar Australia [AUD]	1	10.552,56	10.571,38
Dolar Canada [CAD]	1	11.661,76	11.503,62
Franc Swiss [CHF]	1	18.352,45	16.865,33
Yuan China [CNY]	1	2.176,02	2.242,16
Kroner Denmark [DKK]	1	2.292,35	2.233,39
EURO [EUR]	1	17.086,34	16.608,60
Poundsterling Inggris [GBP]	1	19.683,18	18.810,19
Yen Jepang [JPY]	100	10.920,60	11.795,59
Korean Won [KRW]	1	11,91	12,37
Special Drawing Right (SDR)	1	20.714,04	20.750,46

Dalam penyajian LKBUN *Tahun 2023 Audited*, sebagai dasar kebijakan serta perlakuan selisih kurs atas investasi pada bentuk mata uang asing dan mata uang rupiah, di mana investasi dalam mata uang asing, selisih kursnya masuk pada Laporan Operasional dan investasi mata uang rupiah yang dasar pencatatannya menggunakan mata uang asing yang dirupiahkan, selisih kursnya masuk dalam komponen LPE.

Selain itu, secara khusus pencatatan selisih kurs atas Kas BUN di BI dalam mata uang asing (valas) dalam penyusunan LKBUN *Tahun 2023 Audited* diatur tersendiri melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-19/PB/2016 tentang Perlakuan Akuntansi Selisih Kurs pada Rekening Milik BUN. Dalam Perdirjen tersebut antara lain mengatur bahwa dalam rangka pengelolaan kas, Kuasa BUN dapat:

1) menyimpan kas dalam mata uang asing;
2) melakukan konversi;
3) melakukan kiriman uang atau pemindahbukuan antar Rekening Milik BUN dalam mata uang asing yang sama; dan/atau
4) melakukan pembayaran dengan menggunakan mata uang asing.

Pengelolaan kas di atas dapat menimbulkan selisih kurs yang terdiri dari:

1) Selisih Kurs Belum Terealisasi (*unrealized*); dan
2) Selisih Kurs Terealisasi (*realized*).

Dalam penyusunan, Pencatatan selisih kurs atas Kas BUN di BI dalam mata uang asing (valas): LKBUN

1) Selisih kurs yang belum terealisasi diakui pada saat translasi/ penjabaran saldo Kas di Rekening Milik BUN dalam mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah pada tanggal pelaporan. Selisih Kurs Belum Terealisasi dilakukan penyesuaian pada saat Kuasa BUN melakukan:
   a) kiriman uang atau pemindahbukuan antar Rekening Milik BUN dalam mata uang asing yang sama; dan
   b) pembayaran dengan menggunakan mata uang asing.

   Selisih kurs belum terealisasi dibukukan pada saat tanggal pelaporan keuangan dengan menjabarkan saldo mata uang asing dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs penutup BI pada tanggal pelaporan. Selisih kurs yang belum terealisasi tersebut dibukukan dengan menggunakan akun Selisih Kurs (311711). Pada akhir periode pelaporan (bulanan,

semesteran, dan tahunan), saldo akun Selisih Kurs (311711) diakui sebagai Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi (491111) apabila bersaldo kredit (negatif) dan diakui sebagai Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi (596211) apabila bersaldo debet (positif) sehingga akan tersaji dalam Laporan Operasional.

2) Selisih Kurs Terealisasi diakui pada saat Kuasa BUN melakukan konversi. Konversi tersebut dapat terjadi:
   a) dari mata uang asing ke mata uang rupiah; dan/atau
   b) dari mata uang asing ke mata uang asing lainnya.

   Selisih kurs terealisasi dibukukan pada saat terjadi transaksi dan diperhitungkan dengan Selisih Kurs Belum Terealisasi yang telah dihitung sebelumnya. Selisih Kurs Terealisasi dan penyesuaian Selisih Kurs dihitung berdasarkan metode rata-rata tertimbang dan dibukukan sebagai berikut:
   a) untuk Selisih Kurs Terealisasi yang dihasilkan dari transaksi konversi,akun yang digunakan adalah Pendapatan Dari Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN (425751) atau akun Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN (581415).
   b) untuk penyesuaian Selisih Kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar Rekening Milik BUN dan pembayaran, akun yang digunakan adalah SILPA (311211).

Untuk selisih kurs pada Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Utang dan Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Hibah, diatur sebagai berikut:

1) Sesuai PMK Nomor 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah, selisih kurs belum terealisasi dicatat sebagai kerugian/pendapatan selisih kurs belum terealisasi pada Laporan Operasional dan disajikan pada Kegiatan Non Operasional;

2) Beban/Pendapatan Selisih Kurs yang timbul sebagai akibat dari perbedaan kurs pada tanggal SPP dengan SP2D seluruhnya dihilangkan dengan perlakuan akuntansi sebagai berikut:
   a) Beban/pendapatan selisih kurs (581611/423943) yang muncul sebagai akibat dari transaksi pengeluaran pembiayaan (72xxxx) dijurnal ke akun utang (22xxxx);
   b) Beban/pendapatan selisih kurs (581611/423943) yang muncul sebagai akibat dari transaksi 54xxxx dijurnal ke akun sesuai dengan SPM/SP2D (54xxxx).

12. Transaksi Non Anggaran pada Laporan Arus Kas

Transaksi Transitoris (non anggaran) adalah transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Transaksi non anggaran/transitoris dapat diklasifikasikan menjadi empat yaitu:

a. Transaksi transito
   Transaksi transito adalah transfer uang baik pemberian atau penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran.

b. Transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
   Transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah transaksi kas yang berasal dari potongan

langsung gaji pokok dan tunjangan keluarga pegawai negeri/pejabat negara, iuran asuransi kesehatan yang disetor oleh pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah untuk disalurkan/dikembalikan kepada Pihak Ketiga, serta transaksi penerimaan dan penyetoran pajak rokok.

c. Transaksi pemindahbukuan dan kiriman uang
Transaksi pemindahbukuan/kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening Bendahara Umum Negara. Dalam hal terjadi pemindahbukuan antar rekening dari rekening valas ke rekening rupiah atau rekening valas lainnya maka perlu diakui adanya selisih kurs terealisasi. Selisih kurs terealisasi tersebut dilaporkan dalam LRA dan Laporan Operasional.

d. Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUN
Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUN merupakan transaksi antara rekening BUN dengan rekening pihak ketiga yang disebabkan karena kesalahan pemindahbukuan.

13. Satuan Kerja Transaksi Khusus Suspen Penerimaan

Suspen Penerimaan merupakan transaksi penerimaan yang diterima kasnya di Kas Negara tetapi tidak teridentifikasi entitas penyetornya dan/atau tidak diakui oleh Kementerian Negara/Lembaga/Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Untuk Laporan Keuangan BUN *Tahun 2023 Audited* telah dibentuk satuan kerjanya, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-801/PB/2016 tentang Penunjukan KPPN Khusus Penerimaan Sebagai satuan kerja transaksi khusus suspen penerimaan. Pembentukan satker ini merupakan salah satu bentuk pengendalian atas penerimaan Negara dan upaya menyelesaikan permasalahan suspen penerimaan. Satker Transaksi Khusus Suspen Penerimaan merupakan UAKPA BUN TK lingkup Ditjen Perbendaharaan yang bertugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan.

Penyelesaian atas suspen penerimaan dilakukan terhadap suspen transaksi pendapatan, pengembalian belanja, dan/atau penerimaan transitoris, dengan kondisi sebagai berikut:

a. Transaksi setoran penerimaan yang tidak teridentifikasi di dalam SPAN karena COA tidak lengkap; yang terdiri dari:
   1) Suspen kode satker (SPAN mereklasifikasi menjadi ZZZXXX menggunakan kode akun sesuai setoran);
   2) Suspen kode BA, ES1 (SPAN mereklasifikasi menjadi ZZZ ZZ dengan kode akun sesuai setoran);
   3) Suspen kode akun (SPAN mencatat dengan kode akun 498111).

b. Transaksi setoran dengan kode COA lengkap, namun tidak diakui oleh satker pada saat pelaksanaan rekonsiliasi antara UAKPA dengan KPPN yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak mengakui transaksi penerimaan dari KPA satker.

14. Transfer ke Daerah (TKD)

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 229/PMK.05/2022, pada pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat SATD, dibentuk unit akuntansi dan pelaporan yang terdiri atas:

a. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran BUN (UAKPA BUN) yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
b. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran BUN (UAKKPA BUN) yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran;
c. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN (UAPBUN) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
d. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUN yang selanjutnya disingkat UABUN yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Realisasi anggaran TKD diakui pada saat diterbitkannya SP2D oleh KPPN mitra kerja KPA BA BUN TKD.

Beban TKD diakui pada saat:

a. Resume tagihan yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh KPA BUN sehubungan dengan pelaksanaan realisasi anggaran TKD;
b. Timbul kewajiban pemerintah atas kurang salur TKD yang menjadi hak Pemerintah Daerah dalam satu periode tahun anggaran berjalan.

Piutang TKD diakui sebagai piutang pada saat dana atas TKD yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat melebihi jumlah yang menjadi hak Pemerintah Daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan dan telah ditetapkan sebagai piutang TKD berdasarkan:

a. dokumen penetapan lebih salur transfer atau yang dipersamakan sebagaimana ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan TKD.
b. dokumen hasil rekonsiliasi perhitungan sisa dana yang harus dikembalikan ke rekening kas umum negara antara KPA penyaluran TKD dengan Pemerintah Daerah dan sampai dengan tanggal laporan keuangan tahun berjalan belum dilakukan penyelesaian pengembalian lebih salur TKD.

Piutang Transfer Diestimasi merupakan piutang yang timbul dalam hal perhitungan rekonsiliasi dan verifikasi atas penyaluran TKD tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran yang lalu terdapat kelebihan salur transfer dan belum diketahui secara definitif Pemerintah Daerah penerima yang kelebihan salur transfer dan/atau belum ditetapkan dalam dokumen penetapan lebih salur atau yang dipersamakan.

Piutang Transfer dan Piutang Transfer Diestimasi disajikan dalam Neraca pada pos aset lancar.

Kewajiban TKD diakui sebagai kewajiban pada saat dana TKD yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun anggaran yang bersangkutan kurang jumlah yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan telah ditetapkan sebagai kewajiban TKD berdasarkan dokumen penetapan kurang salur transfer atau yang dipersamakan dan sampai dengan tanggal laporan keuangan tahun berjalan belum dilakukan penyelesaian kurang salur TKD.

Dalam proses pelaksanaan anggaran TKD tahun anggaran berjalan yang masih berlangsung, pagu anggaran dan/atau sisa pagu anggaran TKD yang belum terealisasi tidak dicatat dan disajikan sebagai Kewajiban TKD di Neraca.

Kewajiban Transfer Diestimasi timbul dalam hal perhitungan rekonsiliasi dan verifikasi atas penyaluran TKD tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran yang lalu terdapat kekurangan salur transfer dan belum diketahui secara definitif Pemerintah Daerah penerima yang kekurangan

salur dan/ atau belum ditetapkan dalam dokumen penetapan kurang salur atau yang dipersamakan. Nilai kewajiban transfer diestimasi diukur sebesar nilai nominal sesuai Berita Acara Nota Kesepakatan Final (BA NKF) atau dokumen lain yang menyatakan jumlah kewajiban-piutang diestimasi.

Kewajiban Transfer dan Kewajiban Transfer Diestimasi disajikan di neraca pada pos kewajiban jangka pendek.

15. Penyajian dan Pengungkapan Hak dan Kewajiban Putusan Hukum Inkracht

Kewajiban yang timbul berdasarkan Tuntutan Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dalam hal terjadi tuntutan hukum, pengelolaan data atas tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) ditatausahakan dalam sistem aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Setiap Entitas Pelaporan yang memiliki perkara tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) melakukan pemutakhiran informasi pada sistem informasi tersebut. Selain melakukan pemutakhiran informasi tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), setiap Entitas Pelaporan juga melaporkan tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) atas tuntutan hukum kepada Pemerintah dalam Laporan Keuangan dengan perlakuan akuntansi sebagai berikut:

a. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, maka nilai tuntutan hukum tersebut disajikan sebagai utang kepada pihak ketiga dalam Neraca setelah tidak ada upaya lainnya;
b. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, dan masih ada upaya lainnya maka tidak dilakukan penyajian pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam CaLK; dan
c. Yang dimaksud dengan upaya lainnya adalah masih ada upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan dan belum tersedia anggaran di Entitas Pelaporan/Bagian Anggaran yang bersangkutan.

Selain beberapa hal di atas terdapat beberapa kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan terjadinya perbedaan perlakuan akuntansi atas kewajiban. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

a. Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo
   Untuk sekuritas yang diselesaikan sebelum jatuh tempo antara lain karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (*call feature*) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya (*carrying amount*) harus diungkapkan pada CaLK.

b. Tunggakan
   Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Pembayaran kepada Kreditur pada CaLK sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

c. Restrukturisasi Utang

Restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada CaLK sebagai bagian dari pengungkapan pos kewajiban terkait.

Apabila jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditetapkan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan pada CaLK sebagai bagian dari pengungkapan pos kewajiban terkait.

Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

d. Penghapusan Utang

Penghapusan utang adalah penghapusan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur baik sebagian maupun seluruhnya jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya. Penghapusan utang dapat mengikuti ketentuan yang diatur dalam restrukturisasi utang di atas.

Informasi atas penghapusan utang harus disajikan dalam CaLK yang antara lain mengungkapkan jumlah perbedaan: yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:

1) Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan
2) Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

16. Pencatatan Dana ASR

Pemerintah telah mengatur lebih lanjut atas kebijakan akuntansi dan pelaporan atas pencadangan Dana Abandonment and Site Restoration (ASR) yang ditempatkan pada rekening bersama antara SKK Migas/ BPMA dan KKKS terkait kegiatan hulu migas. Sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-14/PB/PB.6/2022 tanggal 4 Maret 2022, pencatatan Dana ASR dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan kode satker 999975 yang dikonsolidasi ke BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 99908). Pencatatan dilakukan dengan menggunakan kode akun debet 163119 Dana Lainnya dan kredit 221919 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya.

17. Pencatatan Kewajiban Dana Talangan Pengadaan Tanah PSN

Kewajiban talangan pengadaan tanah PSN untuk penyajian laporan keuangan tahun 2023 pada LK K/L diakui berdasarkan berita acara atau dokumen yang dipersamakan antara LMAN, badan usaha, Satker penerima dan/atau pengguna tanah PSN, Badan Pengatur Jalan Tol, dan/atau pihak lain yang

dibutuhkan konfirmasinya, untuk menentukan nilai kewajiban talangan pengadaan tanah PSN yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum terselesaikan (outstanding), baik skema sesuai Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 maupun skema sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020.

Berdasarkan berita acara atau dokumen yang dipersamakan, LMAN melakukan jurnal manual penyesuaian di aplikasi SAKTI 2023 untuk penghentian penyajian kewajiban atas pendanaan pangadaan tanah PSN (akun 212191) di Neraca atas akuntabilitas skema sesuai Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 sebesar saldo nilai tercatat penyajiannya per 31 Desember 2023, sebagai upaya konsistensi satu kesatuan penyajian dan penatausahaan perolehan tanah PSN yang berasal dari kewajiban talangan pengadaan tanah PSN pada Satker vertikal penerima dan/atau pengguna tanah PSN, dengan jurnal manual penyesuaian debet 212191 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya pada kredit 391119 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya.

18. Konsolidasi dan Eliminasi

Kebijakan konsolidasi yang diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan BUN adalah sebagai berikut:

a. Mengkonsolidasi seluruh akun yang tercatat pada buku besar satker-satker lingkup BUN (BA 999);

b. Mengkonsolidasi akun Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU, dan Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada buku besar seluruh satker lingkup Pemerintah Pusat untuk disajikan pada laporan keuangan UAPBUN-AP (BA 999.00), dengan kaidah sebagai berikut:

   1) Konsolidasi Kas di Bendahara Pengeluaran dilakukan dengan menambahkan akumulasi nilai akun 111611 dan 111613 dari seluruh satker Pemerintah Pusat ke buku besar konsolidasian UAPBUN-AP (999.00) dengan akun kontra 399911. Saldo akun 111611 dan 111613 disajikan di neraca pos Kas pada Bendahara Pengeluaran sedangkan akun 399911 disajikan di LPE pada pos Ekuitas BUN di K/L;

   2) Konsolidasi Kas pada BLU dilakukan dengan menambahkan akumulasi nilai akun 111911 dari seluruh satker Pemerintah Pusat ke buku besar konsolidasian UAPBUN-AP (999.00) dengan akun kontra 399912. Saldo akun 111911 disajikan di neraca pos Kas pada BLU sedangkan akun 399912 disajikan di LPE pada pos Ekuitas BUN di K/L;

   3) Konsolidasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah dilakukan dengan menambahkan akumulasi nilai akun 111822 dari seluruh satker Pemerintah Pusat ke buku besar konsolidasian UAPBUN-AP (999.00) dengan akun kontra 399913. Saldo akun 111822 disajikan di neraca pos Kas Lainnya di K/L dari Hibah sedangkan akun 399913 disajikan di LPE pada pos Ekuitas BUN di K/L;

c. Mengeliminasi penyajian ganda antar Bagian Anggaran BUN, dengan kaidah sebagai berikut:

   1) Transaksi pengeluaran pembiayaan pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dicatat oleh dua entitas yaitu UAPBUN Investasi Pemerintah (999.03) sebagai akun 164111 (Dana Penjaminan) dan UAPBUN-AP (999.00) sebagai akun 163119 (Dana Lainnya). Pada buku besar konsolidasian BUN, nilai akun 163119 akan dieliminasi sebesar nilai akun 164111 dengan akun kontra 391111. Eliminasi akun 163119 akan mempengaruhi neraca BUN pada pos Dana Yang Dibatasi Penggunaannya, sedangkan akun 391111 akan mempengaruhi LPE BUN pada pos Koreksi Lain-Lain;

2) Kebijakan konsolidasi atas akun Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU, dan Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada buku besar seluruh satker lingkup Pemerintah Pusat untuk disajikan pada laporan keuangan UAPBUN-AP mengakibatkan nilai Kas di Bendahara Pengeluaran pada UAPBUN-AP termasuk Kas di Bendahara Pengeluaran pada Bagian Anggaran BUN. Oleh karena itu pada buku besar konsolidasian BUN dilakukan eliminasi kembali atas akun 111611 dan 111613 beserta akun kontranya yaitu 399911 senilai saldo yang berada di Bagian Anggaran BUN. Eliminasi akun 111611 dan 111613 akan mempengaruhi neraca BUN pada pos Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan akun 399911 akan mempengaruhi LPE BUN pada pos Ekuitas BUN di K/L.

19. Kebijakan Akuntansi Terkait Properti Investasi

a. Sehubungan dengan terbitnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi (PSAP 17), terdapat kemungkinan satuan kerja (Satker) di lingkungan pemerintah pusat untuk melakukan reklasifikasi keluar dari pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya atas penyajian aset berwujud yang bersifat properti.

b. Paragraf 63 sampai dengan paragraf 66 PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan dan paragraf 4 sampai dengan paragraf 14 PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap, memberikan panduan bahwa aset tetap pemerintah yang disajikan di Neraca pos Aset Tetap diberikan tekanan hanya yang memenuhi kriteria:
   1) aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
   2) digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;
   3) dalam kondisi siap dipakai, dan
   4) jika aset tetap tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, maka disajikan di Neraca di pos Aset Lainnya, termasuk dalam hal ini aset Kerjasama dalam kemitraan.

c. PSAP 17 memberikan panduan prinsip akuntansi berlaku umum bagaimana suatu Satker memperlakukan kebijakan akuntansi atas aset berwujud yang bersifat properti yang mengandung unsur kejadian digunakannya aset tersebut untuk menghasilkan pendapatan sewa atau intensi untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

d. Atas hal tersebut, untuk kebutuhan penerapan PSAP 17 di lingkungan pemerintah pusat, diperlukan kebijakan teknis akuntansi yang bersifat *regulatory-based accounting* yang memberikan panduan pencatatan dan penyajian Barang Milik Negara (BMN) yang bersifat properti yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau intensi untuk meningkatkan nilai aset.

20. Kebijakan Akuntansi Pajak Ditanggung Pemerintah (Pajak DTP)

a. Transaksi atas Pajak DTP dan Bea Masuk (BM) DTP mengakibatkan adanya aliran ekonomi yang terjadi dalam lingkup entitas pemerintah pusat dengan mengakui adanya pendapatan dan belanja dengan nilai yang sama. Berbeda dengan perlakuan belanja perpajakan (tax expenditure), dimana pemerintah tidak mengumpulkan pajak dari pihak ketiga. Tax expenditure tidak dialokasikan dalam mekanisme penganggaran maupun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran terhadap APBN sehingga tax expenditure tersebut dilaporkan secara terpisah dari Laporan Keuangan oleh Satuan Kerja (Satker) yang mempertanggungjawabkan alokasi anggaran belanja subsidi untuk Pajak DTP dan BM DTP maupun pendapatan atas Pajak DTP

dan BM DTP.

b. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan

1) Pajak DTP dan BM DTP diakui oleh entitas akuntansi/pelaporan Kementerian Keuangan (BA 015) melalui mekanisme penerbitan SPM/SP2D Belanja Subsidi Pajak DTP atau BM DTP yang bersifat pengesahan, yaitu pada saat SPM Belanja Subsidi Pajak DTP atau BM DTP yang bersifat pengesahan dan nihil dengan potongan penerimaan Pajak DTP atau BM DTP telah diterbitkan SP2D-nya oleh KPPN.

2) Dengan demikian secara bersamaan dengan pengakuan pendapatan Pajak DTP dan BM DTP pada potongan SPM/SP2D, Belanja Subsidi Pajak DTP dan BM DTP diakui oleh entitas akuntansi/pelaporan BUN (BA 999) melalui mekanisme penerbitan SPM/SP2D Belanja Subsidi Pajak DTP atau BM DTP yang bersifat pengesahan yang diajukan oleh Satker BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA BUN 999.07).

3) Belanja subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP diukur sebesar nilai SPM/SP2D Belanja Subsidi Pajak DTP atau BM DTP yang bersifat pengesahan, dan pendapatan dari Halm. 4 dari 8 Pajak DTP atau BM DTP diukur sebesar nilai potongan pada SPM/SP2D Belanja Subsidi Pajak DTP atau BM DTP yang bersifat pengesahan.

4) Nilai belanja subsidi Pajak DTP atau BM DTP disajikan oleh entitas akuntansi/pelaporan BUN (BA 999) melalui Satker BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA BUN 999.07) sebagai belanja subsidi di LRA dan sebagai beban subsidi di LO pos kegiatan operasional.

5) Nilai pendapatan Pajak DTP atau BM DTP disajikan oleh entitas akuntansi/pelaporan Kementerian Keuangan (BA 015) sebagai pendapatan perpajakan di LRA dan sebagai pendapatan-LO perpajakan di LO pos kegiatan operasional.

6) Belanja subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP dan pendapatan Pajak DTP dan/atau BM DTP diungkapkan secara memadai dan paling sedikit menjelaskan informasi mengenai:
   a) Nilai realisasi anggaran masing-masing belanja subsidi Pajak DTP/BM DTP dan/atau pendapatan Pajak DTP/BM DTP; dan
   b) Jenis belanja subsidi Pajak DTP/BM DTP dan/atau pendapatan Pajak DTP/BM DTP.

c. Konsolidasi Transaksi atas Pajak DTP dan BM DTP di Tingkat LKPP

1) Konsolidasi Laporan Keuangan di LRA
   a) Entitas konsolidator pelaporan tingkat LKPP menggabungkan LRA seluruh entitas pelaporan bagian anggaran, baik Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga maupun Bagian Anggaran BUN.
   b) Tidak ada eliminasi atas penyajian belanja subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP terhadap penyajian pendapatan Pajak DTP dan/atau BM DTP.
   c) Konsolidasi pendapatan Pajak DTP dan/atau BM DTP dan belanja subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP disajikan di LRA secara bruto pada masing-masing pos pendapatan perpajakan dan pos belanja subsidi.
   d) Penyajian pendapatan Pajak DTP dan/atau BM DTP dan belanja subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP di LRA sebagai ketaatan dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang diamanatkan dan ditetapkan dalam APBN/APBN-P, sehingga penyajian realisasinya diperbandingkan dengan pagu anggarannya dalam

satu tahun anggaran.

2) Konsolidasi Laporan Keuangan di LAK
   a) Entitas konsolidator pelaporan tingkat LKPP menggabungkan LAK yang ada di entitas pelaporan BUN yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
   b) Tidak ada eliminasi atas penyajian arus kas masuk pendapatan Pajak DTP dan/atau BM DTP dan penyajian arus kas keluar belanja subsidi untuk Pajak DTP dan/atau BM DTP.
   c) Konsolidasi pendapatan Pajak DTP dan/atau BM DTP dan belanja subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP disajikan di LAK secara bruto masing-masing pos arus kas dari operasi.
   d) Penyajian arus kas dari operasi secara bruto di LAK terhadap pendapatan Pajak DTP dan/atau BM DTP dan belanja subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP memberikan informasi historis transaksional masing-masing pos arus kas dari operasi pemerintah, dan dapat juga digunakan sebagai pengendalian dan konsisten perlakuan akuntansi atas transaksi berbasis kas yang berlaku terhadap penyajian LRA dan LAK.

3) Konsolidasi Laporan Keuangan di LO
   a) Entitas konsolidator pelaporan tingkat LKPP menggabungkan LO seluruh entitas pelaporan bagian anggaran, baik Bagian Anggaran Kementerian
   b) Negara/Lembaga maupun Bagian Anggaran BUN.

Dalam melakukan konsolidasi sebagaimana dimaksud angka 1), diperlukan eliminasi akun-akun timbal balik di tingkat LKPP terhadap penyajian di LO untuk nilai beban subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP yang berhubungan dengan penyajian pendapatan – LO Pajak DTP dan/atau BM DTP dengan nilai yang sama sebagaimana didasarkan dalam satu dokumen yang sama dalam SPM/SP2D belanja subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP yang bersifat pengesahan dengan potongan pajak DTP dan/atau BM DTP tahun anggaran berjalan.

21. Kebijakan Akuntansi UPSL THT

a. Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 52/PMK.02/2023 yang merupakan perubahan kedua atas PMK Nomor 25/PMK.02/2013, yang mengatur bahwa *Unfunded Past Service Liability* atas Program THT (UPSL THT) PT Taspen (Persero) yang diakui dalam Peraturan Menteri ini adalah *Unfunded* PSL yang terjadi akibat kondisi a. perubahan formula manfaat Program THT PNS; b. kenaikan besaran gaji pokok PNS yang menjadi dasar pembayaran manfaat Program THT PNS; dan/atau c. perubahan metode dan/atau asumsi aktuaria yang disetujui oleh Menteri Keuangan.
b. Kebijakan Akuntansi pencatatan UPSL THT tahun 2023 adalah disajikan sebagai Beban Tunjangan Hari Tua (*Unfunded Liability*) (513161) pada Utang Kepada Dana Pensiun dan THT (Kewajiban Jangka Panjang). Pencatatan dalam Kewajiban Jangka Panjang dilakukan karena rencana penyelesaian kewajiban yang melebihi 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
c. Pengakuan dan penyajian UPSL THT sebagai Kewajiban Jangka Panjang, sejalan dengan pengaturan dalam Paragraf 11 PSAP Nomor 09 Akuntansi Kewajiban PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa ”Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan”. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

22. *Treasury Deposit Facility*

a. TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemda untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai berupa penyimpanan dana *overnight* pada rekening lain BI TDF – TKD Pemda di Bank Indonesia.
b. Atas saldo dana TDF, pemerintah daerah akan menerima remunerasi yang tarifnya sama dengan persentase yang diterima pemerintah dari BI. Remunerasi dibayarkan dari RKUN ke RKUD setiap 3 bulan sekali, berdasarkan rekonsiliasi antara Direktorat Pengelolaan Kas Negara DJPb dengan Direktorat Transfer Umum DJPK.
c. *Holding period* TDF ditetapkan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya DAU dan/atau DBH di fasilitas TDF pada Bank Indonesia. Setelah masa *holding period*, dana tetap di fasilitas TDF sampai dengan dilakukan penyaluran ke RKUD.
d. Penarikan dana di rekening TDF dapat dilakukan dalam masa *holding period* dan setelah masa *holding period* berdasarkan permintaan kepala daerah. Penarikan dana pada masa *holding period* dilaksanakan dengan kondisi kebutuhan kas daerah yang mendesak akibat bencana; dan/atau saldo kas daerah diperkirakan kurang dari 20% dari kebutuhan belanja daerah selama satu bulan secara selektif.
e. Sedangkan untuk penarikan dana setelah masa *holding period* dilaksanakan jika daerah memiliki kebutuhan kas daerah yang mendesak akibat bencana, saldo kas daerah diperkirakan kurang dari 20% dari kebutuhan belanja daerah selama satu bulan dan/atau kondisi lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

23. Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA)

a. Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disingkat RPATA adalah rekening lain-lain milik BUN untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.
b. RPATA dibuka dengan nama Rekening Lain BI RPATA yang merupakan satu rekening yang digunakan untuk menampung dana atas transaksi dari seluruh Satker untuk membayar pekerjaan.
c. Dana yang tersimpan di RPATA selanjutnya akan dibayarkan apabila:
    1) pekerjaan selesai 100%,
    2) masa kontrak berakhir; atau
    3) batas waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan berakhir.
d. Dalam hal setelah dilakukan pembayaran masih terdapat saldo dalam RPATA atas sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan, dananya akan dipindahbukukan ke RKUN.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN BUN

Realisasi Pendapatan BUN dan Hibah Tahun 2023 adalah sebesar **Rp272.810.959.159.689** atau mencapai 122,11 persen dari target APBN 2023 sebesar **Rp223.406.883.238.000**. Realisasi Pendapatan BUN dan Hibah berasal dari Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar **Rp255.626.800.279.964** dan Penerimaan Hibah sebesar **Rp17.184.158.879.725**. Pendapatan BUN dan Hibah Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar **Rp34.469.048.388.336** atau **14,46 persen** dibandingkan dengan Tahun 2022. Rincian Realisasi Pendapatan BUN dan Hibah Tahun 2023 dapat dilihat di **Lampiran LB1**.

Realisasi Belanja BUN pada Tahun 2023 adalah sebesar **Rp1.968.987.928.663.857** atau mencapai **99,43 persen** dari target APBN sebesar **Rp1.980.251.879.807.000**. Realisasi Belanja BUN Tahun 2023 terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar **Rp1.087.557.384.455.403** dan Transfer ke Daerah sebesar **Rp881.430.544.208.454.**

Realisasi Pembiayaan BUN pada Tahun 2023 adalah sebesar **Rp356.663.747.714.521** atau mencapai **74,32 persen** dari target APBN sebesar **Rp479.927.462.971.000**. Realisasi pembiayaan tersebut terdiri dari pembiayaan dalam negeri sebesar **Rp277.369.700.819.453** dan pembiayaan luar negeri sebesar **Rp79.294.046.895.068**. Seluruh pembiayaan negara berasal dari pembiayaan BUN.

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. Pendapatan BUN dan Hibah

Realisasi Pendapatan dan Hibah Tahun 2023 sebesar Rp272.810.959.159.689 berasal dari PNBP sebesar Rp255.626.800.279.964 dan Penerimaan Hibah sebesar Rp17.184.158.879.725.

B.2.1.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2023 sebesar Rp255.626.800.279.964 atau 116,03 persen dari target sebesar Rp220.306.883.238.000. Realisasi PNBP Tahun 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp22.980.944.922.403 atau 9,88 persen dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp232.645.855.357.561. Realisasi PNBP berasal dari (i) Pendapatan Sumber Daya Alam; (ii) Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan; dan (iii) PNBP Lainnya.

B.2.1.1.1. Pendapatan Sumber Daya Alam

Realisasi Pendapatan Sumber Daya Alam Tahun 2023 adalah sebesar Rp118.872.894.679.746 atau 112,26 persen dari target APBN Tahun 2023 (Perpres 75 Tahun 2023) sebesar Rp105.893.722.264.000. Realisasi penerimaan SDA tersebut lebih kecil Rp31.990.705.017.229 atau mengalami penurunan sebesar 21,21 persen dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp150.863.599.696.975. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh realisasi ICP hanya mencapai USD76,46 per barel untuk periode Desember 2022 – Mei 2023 atau 84,96 persen dari target ICP APBN TA 2023 dan USD76,41 per barel untuk periode Januari 2023 – Mei 2023 atau hanya mencapai 84,90 persen dari target ICP APBN TA 2023 di mana target ICP yang ditetapkan pada APBN TA 2023 sebesar USD90 per barel. Realisasi rata-rata ICP tahun 2022 di kisaran USD100. Penurunan Pendapatan SDA juga disebabkan penurunan lifting minyak bumi sebesar 12,79 MBOPD. Namun, lifting gas bumi mengalami peningkatan sebesar 52,64 MBOEPD.

Pendapatan Sumber Daya Alam merupakan PNBP yang berhubungan dengan kegiatan eksploitasi sumber daya alam, berasal dari pengolahan minyak bumi, gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Sesuai dengan ketentuan perundangan, ketiga jenis pendapatan tersebut dibagihasilkan ke daerah dalam rangka desentralisasi fiskal. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Penerimaan SDA Tahun 2023 sebagai berikut.

No	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan Minyak Bumi	76.351.120.000.000	87.408.885.465.416	114,48%
2	Pendapatan Gas Bumi	27.250.340.000.000	28.769.670.492.312	105,58%
3	Pendapatan Pertambangan dan Panas Bumi	2.292.262.264.000	2.694.338.722.018	117,54%
Jumlah		105.893.722.264.000	118.872.894.679.746	112,26%

Rincian realisasi Penerimaan SDA Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	(Kenaikan/ Penurunan)
1	Pendapatan Minyak Bumi	87.408.885.465.416	111.992.940.458.410	(24.584.054.992.994)
2	Pendapatan Gas Bumi	28.769.670.492.312	36.705.949.688.708	(7.936.279.196.396)
3	Pendapatan Pertambangan dan Panas Bumi	2.694.338.722.018	2.164.709.549.857	529.629.172.161
Jumlah		**118.872.894.679.746**	**150.863.599.696.975**	**(31.990.705.017.229)**

Pendapatan Minyak Bumi

Pendapatan minyak bumi TA 2023 terealisasi sebesar Rp87.408.885.465.416 atau 114,48 persen dari estimasi APBN TA 2023 (Perpres 75) sebesar Rp76.351.120.000.000. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, pendapatan minyak bumi lebih rendah Rp24.584.054.992.994 atau 21,95 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh penurunan realisasi ICP pada tahun 2023. Selain itu, penurunan Pendapatan minyak bumi juga disebabkan penurunan nilai *lifting* pada tahun 2023. Nilai *lifting* minyak bumi tahun 2023 sebesar 599,51 MBOPD, lebih kecil sebesar 12,79 MBOPD dibandingkan *lifting* tahun 2022 sebesar 612,30 MBOPD.

Realisasi Pendapatan SDA Minyak Bumi sebesar Rp87.408.885.465.416 telah memperhitungkan koreksi atas reklasifikasi akun yang berasal dari perhitungan alokasi PNBP Migas yang menyebabkan perubahan alokasi Pendapatan Minyak Bumi menjadi Pendapatan Gas Bumi dan Pendapatan Minyak Mentah DMO sebagai berikut:

a. Terdapat Koreksi kurang atas reklasifikasi pendapatan minyak bumi (kode akun 421111) menjadi pendapatan gas bumi (kode akun 421211) sebesar Rp28.769.670.492.312 antara lain merupakan tambahan penerimaan dari hasil rekonsiliasi hulu hilir HGBT sebesar Rp2.578.068.992.086.
b. Koreksi kurang atas reklasifikasi pendapatan minyak bumi (kode akun 421111) menjadi pendapatan minyak mentah DMO (kode akun 423132) sebesar Rp4.446.262.623.442.

Pendapatan Gas Bumi

Pendapatan Gas Bumi pada tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp28.769.670.492.312 atau mencapai 105,58 persen dari estimasi pendapatan pada APBN TA 2023 (Perpres 75) sebesar Rp27.250.340.000.000. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, realisasinya menurun sebesar Rp7.936.279.196.396 atau 21,62 persen. Namun demikian, nilai lifting gas bumi mengalami peningkatan. Nilai lifting gas bumi tahun 2023 sebesar 1.006,05 MBOEPD, lebih besar sebesar 52,64 MBOEPD dibandingkan lifting tahun 2022 sebesar 953,41 MBOEPD.

Pendapatan Gas Bumi Tahun 2023 sebesar Rp28.769.670.492.312 telah memperhitungkan koreksi atas reklasifikasi akun yang berasal dari hasil perhitungan alokasi PNBP SDA Migas yang menyebabkan perubahan alokasi dari pendapatan minyak bumi menjadi pendapatan gas bumi, yaitu koreksi kurang atas reklasifikasi pendapatan minyak bumi (kode akun 421111) menjadi pendapatan gas bumi (kode akun 421211) sebesar Rp28.769.670.492.312.
Di antara nilai pendapatan gas bumi yang direklasifikasi tersebut, sejumlah USD169.353.579 atau ekuivalen Rp2.578.068.992.086 merupakan nilai penerimaan bagian negara dari hasil rekonsiliasi hulu hilir HGBT yang telah dibayarkan melalui rekening migas, dan kemudian telah diterima seluruhnya di Rekening Kas Umum Negara secara utuh melalui mekanisme reklasifikasi. Nilai pembayaran atas penerimaan bagian negara dari hasil rekonsiliasi hulu hilir HGBT tersebut mencapai 97,55 persen dari total penerimaan bagian negara atas hasil rekonsiliasi hulu-hilir HGBT Tahun 2020-2022 sebesar USD173.602.901.

Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2023, target Pendapatan Panas Bumi TA 2023 sebagaimana dirinci melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.426.540.083.000 yang terdiri atas target Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi (PNBP Khusus BUN) sebesar Rp2.292.262.264.000 dan target pendapatan PNBP yang merupakan bagian dari penerimaan PNBP Kementerian ESDM yaitu Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi sebesar Rp34.434.383.000 dan Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi sebesar Rp99.843.436.000.

Realisasi Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi (Pendapatan LRA) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.694.338.722.018 atau mencapai 117,54% dari target Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi tahun 2023 sebesar Rp2.292.262.264.000. Keseluruhan Pendapatan Panas Bumi Satker PNBP Khusus BUN Pengelola Panas Bumi merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rincian realisasi PNBP panas bumi dapat dilihat sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	%
a	Setoran Bagian Pemerintah	3.727.920.311.039	2.943.846.689.945	26,63%
b	Reimbursement PPN	517.000.000.000	390.000.000.000	32,56%
c	PBB Pertambangan Panas Bumi	439.988.647.320	400.171.960.144	9,95%
d	Penggantian bonus produksi panas bumi	110.179.077.605	83.668.638.662	31,69%
e	Pendapatan pengusahaan Panas Bumi (a-b-c-d)	2.660.752.586.114	2.070.006.091.139	28,54%
f	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi pembulatan ke bawah	2.660.752.586.113	2.070.006.091.139	28,54%
g	PNBP Panas Bumi yang berasal dari saldo cadangan reimbursement PPN	33.586.135.905	76.011.903.302	(55,81%)
h	Pendapatan pengusahaan Panas Bumi yang berasal dari kekurangan penyetoran bagian pemerintah	0	18.691.555.416	(100%)
Total Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi (f+g+h)		**2.694.338.722.018**	**2.164.709.549.857**	**24,47%**

Realisasi Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 24,47% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 terutama disebabkan oleh adanya tambahan SBP periode Triwulan II Tahun 2023 dengan diterimanya pembayaran listrik Star Energy Geothermal Wayang Windu (SEGWWL) Unit I dari PT PLN untuk periode Juli – Desember 2022 yang sebelumnya tertunda karena dispute eskalasi harga.

Realisasi Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi selama tahun 2023 berasal dari Setoran Bagian Pemerintah atas sembilan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi (terdiri atas delapan Pengusaha Panas Bumi yang telah beroperasi) setelah dikurangi dengan kewajiban perpajakan (reimbursement PPN, Pajak Bumi dan Bangunan, serta penggantian bonus produksi panas bumi) sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

No	Badan Usaha	Wilayah Kerja Panas Bumi	Jumlah
1	PT Pertamina Geothermal Energy, Tbk	Kamojang, Jawa Barat	409.697.080.709
2	PT Pertamina Geothermal Energy, Tbk	Lahendong, Sulawesi Utara	92.823.455.915
3	PT Pertamina Geothermal Energy, Tbk	Ulubelu, Lampung	80.166.584.827
4	PT Pertamina Geothermal Energy, Tbk	Lumut Balai, Sumatera Selatan	9.540.068.149
5	Star Energy Geothermal Salak, Ltd	Gunung Salak, Jawa Barat	828.113.903.795
6	Star Energy Geothermal Salak Pratama, Ltd		
7	Star Energy Geothermal Darajat I, Ltd	Darajat, Jawa Barat	536.799.703.364
8	Star Energy Geothermal Darajat II, Ltd		
9	PT Darajat Geothermal Indonesia		
10	Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd	Wayang Windu, Jawa Barat	773.483.133.579
11	PT Geo Dipa Energi (Persero)	Dieng, Jawa Tengah	99.272.727
12	PT Geo Dipa Energi (Persero)	Patuha, Jawa Barat	28.117.126.834
13	*Faktor Pengurang: Pembayaran PBB *)*		64.501.607.881
PNBP Pengusahaan Panas Bumi			**2.694.338.722.018**

Keterangan:
**) Pembayaran PBB sebesar Rp64.501.607.881 adalah pembayaran PBB untuk Wilayah Kerja yang belum menyetorkan bagian Pemerintah.

B.2.1.1.2. Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

Realisasi Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2023 adalah sebesar Rp82.058.743.373.870 atau sebesar 100,64 persen dari target penerimaan selama Tahun 2023 sebesar Rp81.535.797.918.000.

Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp41.461.651.427.721 atau 102,13 persen apabila dibandingkan dengan realisasi Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2022 yang mencapai Rp40.597.091.946.149. Secara umum peningkatan tersebut utamanya dipengaruhi oleh membaiknya kinerja Badan Usaha pada tahun buku 2022. Perbaikan tersebut tercermin dari peningkatan realisasi Penerimaan Bagian Pemerintah dari pembagian dividen secara tunai TA 2023 dibandingkan dengan TA 2022. Kondisi ini disebabkan oleh meningkatnya kinerja BUMN pada tahun buku 2022 utamanya pada sektor perbankan, sektor industri energi, minyak dan gas, sektor pangan dan pupuk, serta sektor mineral dan batubara. Dalam realisasi penerimaan bagian pemerintah dari pembagian dividen secara tunai pada periode TA 2023, juga termasuk pembayaran piutang dividen tahun-tahun sebelumnya.

Rincian Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Uraian	2023	2022	%
Pend. Laba BUMN Perbankan	40.839.347.648.527	24.577.522.332.666	66,17
Pend. Laba BUMN Non Perbankan di Bawah Kementerian BUMN	40.377.896.128.343	15.158.107.928.576	166,38
Pend. Laba BUMN dibawah Kementerian Keuangan	841.499.597.000	861.461.684.907	(2,32)
Jumlah	82.058.743.373.870	40.597.091.946.149	102,13

Rincian Realisasi Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2023 dapat dilihat pada **lampiran LRA LB2**.

B.2.1.1.3. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2023 adalah sebesar Rp54.695.162.226.348 atau 166,36 persen dari target APBN Tahun 2023 (Perpres 75 tahun 2023) sebesar Rp32.877.363.056.000. Realisasi PNBP Lainnya Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp13.509.998.511.911 atau 32,80 persen dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022. Kenaikan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya didominasi oleh Pendapatan Bunga dan Pengelolaan Rekening sebesar Rp20.859.257.777.966 atau 114,33 persen. Realisasi PNBP Lainnya ini terdiri dari:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Pengelolaan BMN	5.754.146.701.830	11.244.433.267.622	(5.490.286.565.792)	(48,83)
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	456.468.837	248.049.857	208.418.980	84,02
Pendapatan Bunga dan Pengelolaan Rekening	39.103.559.676.563	18.244.301.898.597	20.859.257.777.966	114,33
Pendapatan Iuran dan Denda	8.990.578.863	7.465.771.656	1.524.807.207	20,42
Pendapatan Lain-lain	9.828.008.800.255	11.688.714.726.705	(1.860.705.926.450)	(15,92)
Jumlah	54.695.162.226.348	41.185.163.714.437	13.509.998.511.911	32,80

Rincian PNBP lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2023
999.01 (Pengelola Utang)		7.227.638.423.340
425721	Pendapatan *Gain on Bond Redemption* atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Jangka Panjang	105.211.500.000
425731	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah	6.510.426.214.822
425733	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Negeri/Rupiah	612.000.578.273
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	130.245
999.02 (Pengelola Pemberian Pinjaman)		-
425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	-
999.03 (Pengelola Pemberian Pinjaman)		1.528.399.850.505
425719	Pendapatan Bunga Lainnya	1.255.258.716.505
425741	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur	132.719.012.880
425747	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Loss Limit	140.422.121.120
999.04 (Pengelola Pemberian Pinjaman)		1.709.794.647.107
425713	Pendapatan Bunga dari Piutang dan Pemberian Pinjaman	1.619.952.431.808
425762	Pendapatan Jasa Bank dari Pemberian Pinjaman	88.435.656
425763	Pendapatan Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman	84.502.824.372
425823	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman	3.225.159.507
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	1.741.268.658
425981	Penerimaan Lainnya dari Piutang Pemberian Pinjaman	284.527.106
999.05 (Pengelola Belanja Transfer Daerah)		8.728.950.943.193
425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	51.494.391.768
425919	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah Tahun Anggaran Yang Lalu	8.677.456.551.425
999.07 (Pengelola Belanja Subsidi)		21.170.959.055
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	91.120
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	312.999.733
425915	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	20.857.868.202

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2023
999.08 (Pengelola Belanja Lain-Lain)		725.763.570.306
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	6.543.456
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	74.370.031
425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	725.682.006.818
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	650.001
999.99 (Pengelola Transaksi Khusus)		34.753.443.832.842
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	83.759.569.241
425141	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS	213.724.267.365
425142	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B	528.386.930.575
425143	Pendapatan atas Pemanfaatan Aset Properti	637.160.330
425144	Pendapatan Atas Aset Saham dan Surat Berharga Lain	2.577.149.393
425145	Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa	3.057.175.007
425149	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	295.118.190.489
425162	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	4.446.262.623.442
425169	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	180.617.092.532
425235	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi	456.468.837
425744	Pendapatan Bunga Reverse Repo	134.699.993.259
425751	Pendapatan dari Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	139.897.111.019
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	34.916.359.172
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	513.610
425772	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum	135.698.767.125
425773	Pendapatan dari Pelaksanaan *Treasury Notional Pooling*	496.523.253.915
425774	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia	27.251.700.777.294
425776	Pendapatan atas pengelolaan Rekening Khusus (Reksus) Pinjaman dan/atau Hibah	449.314.048.224
425814	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA	14.729.016
425815	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia	10.000
425816	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan *Treasury Notional Pooling*	140.000
425817	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi	227.913.125
425818	Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas	5.135.257.451
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	2.617.449.782
425921	Penerimaan Kembali Belanja Kontribusi Sosial TAYL	327.244.663.561
425984	Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan	493.842.411
425998	Pendapatan dari Retur SP2D	3.945.146.763
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	16.190.303.515
425748	Pendapatan atas Penempatan Uang berprinsip Syariah	226.926.389
Jumlah		**54.695.162.226.348**

Pendapatan pada unit pengelola utang (999.01) berasal dari pengelolaan transaksi SBN mayoritas berasal dari pendapatan premium atas transaksi penerbitan SUN dan SBSN sebesar Rp7.227.638.423.340.

Realisasi PNBP Tahun 2023 sebesar Rp7.227.638.423.340 lebih tinggi daripada Tahun 2022 sebesar Rp1.016.338.638.790. Hal ini dikarenakan kenaikan nilai pendapatan premium dalam rangka penerbitan SBN.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya dari pengelolaan transaksi SBN berasal dari transaksi:

1. *Gain* atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Jangka Panjang sebesar Rp105.211.500.000.
2. Penjualan Obligasi Negara dan SBSN dalam rupiah berupa pendapatan premium atas transaksi penerbitan SUN dan SBSN sebesar Rp7.122.426.793.095.
3. Pengujian Evaluasi Tahunan atas Sistem Mitra Distribusi dalam Rangka Penjualan SUN Ritel 2023 sebesar Rp93.200.
4. *Test Swift Amount* Sukuk Global sebesar Rp37.045.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada BA BUN 999.02 Rp0, sementara pada tahun 2022 terdapat realisasi PNBP sebesar Rp172.854.902.180. PNBP tersebut berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu dan Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran yang Lalu pada Satker Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Kode Satker 985251 dan 985261) yang sebelumnya mengelola Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan pengalihan pengelolaan Belanja Hibah ke Daerah ke BA BUN 999.05 (Pengelolaan Transfer ke Daerah), PNBP tersebut tidak dilaporkan melalui BA BUN 999.02.

Penerimaan bukan pajak lainnya sebesar Rp1.528.399.850.505 pada unit pengelola investasi pemerintah (999.03) merupakan pendapatan yang berasal dari:

1. Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Loss Limit sebesar Rp140.422.121.120 yang diterima dari PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo dan Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur sebesar Rp132.719.012.880. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan IJP Loss Limit untuk pelaku usaha UMKM sebagai salah satu program penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur dari proyek KPBU
2. Setoran bunga IP PEN sebesar Rp242.426.158.826. Rincian penyetoran bunga yang berasal dari Perusahaan Negara penerima Investasi Jangka Panjang Pemerintah Non Permanen dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional dan setoran denda keterlambatan penyetoran bunga tahun 2023 adalah sebagai berikut:
    a. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar Rp28.007.638.896 untuk kewajiban bunga periode 30 Oktober 2022 s.d. 30 April 2023. Perhitungan pembayaran bunga berdasarkan Perjanjian Pemberian Investasi Pemerintah RI kepada PT PN III No. 75 tanggal 28 Desember 2020.
    b. Perum Perumnas sebesar Rp19.500.000.000 untuk kewajiban bunga periode 30 November 2022 s.d. 30 Mei 2023. Perhitungan pembayaran bunga berdasarkan Perjanjian Pemberian Investasi Pemerintah RI kepada Perumnas Nomor 179 tanggal 25 November 2020.
    c. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp65.989.583.333 untuk kewajiban bunga periode 30 Oktober 2022 s.d. 30 April 2023. Perhitungan pembayaran bunga berdasarkan Perjanjian Pemberian Investasi Pemerintah RI kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor 173 tanggal 28 Desember 2020.
    d. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar Rp29.767.478.264 untuk kewajiban bunga periode 30 April 2023 s.d. 30 Oktober 2023. Perhitungan pembayaran bunga berdasarkan

Perjanjian Pemberian Investasi Pemerintah RI kepada PT PN III No. 75 tanggal 28 Desember 2020.

e. Perum Perumnas sebesar Rp19.500.000.000 untuk kewajiban bunga periode 30 Mei 2023 s.d. 30 November 2023. Perhitungan pembayaran bunga berdasarkan Perjanjian Pemberian Investasi Pemerintah RI kepada Perumnas Nomor 179 tanggal 25 November 2020.

f. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp79.661.458.333 untuk kewajiban bunga periode 30 April 2023 s.d. 30 Oktober 2023. Perhitungan pembayaran bunga berdasarkan Perjanjian Pemberian Investasi Pemerintah RI kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor 173 tanggal 28 Desember 2020.

3. Pemindahan saldo dana dari RIBUN ke RKUN dan dari RKUN ke RIBUN atas imbal hasil Investasi Pemerintah pada BP Tapera dalam rangka realisasi PNBP Pemerintah sebesar Rp517.756.140.530.

4. Hasil penempatan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah di PT Sarana Multi Infrastruktur berupa pendapatan bunga Pinjaman PEN Daerah sebesar Rp488.884.709.149 dan pendapatan bunga deposito atas pengelolaan dana PEN PT SMI Tahun 2020 sebesar Rp921.164.250 dan Tahun 2021 sebesar Rp5.270.543.130

Penerimaan negara bukan pajak lainnya pada unit pengelola pemberian pinjaman (999.04) sebesar Rp1.709.794.647.107 diperoleh dari aktifitas pemberian pinjaman yaitu Pendapatan Bunga, Pendapatan Denda, dan Pendapatan Lain-Lain.

Pada unit pengelola Transfer ke Daerah (999.05) sebesar Rp8.728.950.943.193 merupakan gabungan penerimaan dari masing-masing Satker BA 999.05. Rincian PNBP Lainnya ditampilkan pada tabel berikut:

Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		Realisasi
I	Dana Transfer Umum	**5.960.825.244.000**
	A. DAU	0
	B. DBH	5.960.825.244.000
II	Dana Transfer Khusus	**2.768.052.796.716**
	C. DAK Non Fisik	2.716.558.404.948
	D. DAK Fisik	
	E. Hibah Kepada Daerah	51.494.391.768
III	Dana Desa, Insentf Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DIY	**72.902.477**
	F. Dana Desa	72.902.477
	G. Insentif Fiskal	0
	H. Otonomi Khusus	0
	I. Keistimewaan DIY	0
Jumlah PNBP Lainnya		**8.728.950.943.193**

Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya pada unit pengelola belanja subsidi (999.07) sebesar Rp21.170.959.055 berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp 20.857.868.202, Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp 312.999.733, dan Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp91.120.

Realisasi pendapatan negara BA Belanja Lain-lain (999.08) Tahun 2023 sebesar Rp725.763.570.306 seluruhnya merupakan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) lainnya. Realisasi tersebut Rp816.090.210.522 lebih rendah dari realisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp1.541.853.780.828. Pendapatan negara tersebut terdiri atas Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp725.682.656.819, Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp74.370.031, dan Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp6.543.456. Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu terdapat pada satker SKK Migas sebesar Rp3.380.366.678, OJK Rp119.223.400, BP Batam Rp627.507.245, Ditjen PPI Kominfo Rp14.911.735.561, MPPKP sebesar Rp30.658.344.691, Direktorat Jenderal Anggaran (Satker Kompensasi) Rp675.985.479.244.

Penerimaan PNBP lainnya pada unit pengelola transaksi khusus (999.99) adalah sebesar Rp34.753.443.832.842 terdiri dari Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha, Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum, Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening dan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Denda, dan Pendapatan Lain-lain. Berikut rincian PNBP Lainnya pada BA BUN 999.99:

No	Uraian	Tahun 2023
1	PNBP Pengelolaan Kas Negara	28.604.371.915.203
2	PNBP Pengelolaan Dana Pensiun, Akes dll	364.667.973.494
3	PNBP Satker TK Suspen Penerimaan	14.622.737.040
4	PNBP Pengelola KPPN KPH	9.555.480.032
5	PNBP Lainnya dari Pengelolaan Aset BLBI	3.214.309.723
6	PNBP Lainnya dari Pengelolaan aset Eks Pertamina	207.730.840.292
7	PNBP Lainnya Pengelolaan BMN KKKS	297.445.453.606
8	PNBP Lainnya Pengelolaan BPLS	-
9	PNBP Setoran Lainnya Surplus Otoritas Jasa Keuangan	493.842.411
10	PNBP Satker Migas	4.632.014.973.425
11	PNBP Pengelola Panas Bumi	-
12	PNBP Pengelola BMN PKP2B	528.386.930.575
13	PNBP Pengelolaan Aset Lain-Lain	87.864.202.034
14	PNBP Lainnya Aset Bekas Milik Asing Tionghoa	3.057.175.007
15	PNBP Pengelola BMN Idle	18.000.000
Jumlah		**34.753.443.832.842**

B.2.1.2. Pendapatan Hibah

Realisasi Anggaran atas Penerimaan Hibah selama Tahun 2023 sebesar Rp17.184.158.879.725 atau 554,33 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp3.100.000.000.000. Realisasi pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp11.488.103.465.933 atau 201,69 persen dibanding realisasi Tahun 2022. Penerimaan Hibah bersumber dari Penerimaan Hibah dalam negeri sebesar Rp15.361.429.146.772 dan Penerimaan Hibah luar negeri sebesar Rp1.822.729.732.953. Rincian Penerimaan Hibah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
Hibah Dalam Negeri	15.361.429.146.772	2.672.694.521.172	474,75
Hibah Langsung Bentuk Uang	15.361.429.146.772	2.672.694.521.172	474,75
Hibah Luar Negeri	1.822.729.732.953	3.023.360.892.620	(39,71)
Hibah Terencana Bilateral	181.831.927.857	186.394.259.492	(2,45)
Hibah Terencana Multilateral	241.343.042.190	399.456.041.533	(39,58)
Hibah Langsung Bentuk Uang	1.399.554.762.906	2.437.510.591.595	(42,58)
Jumlah	17.184.158.879.725	5.696.055.413.792	201,69

Penerimaan Hibah bersumber dari Penerimaan Hibah dalam negeri sebesar Rp15.361.429.146.772 merupakan Penerimaan Hibah dalam negeri tidak melalui kuasa BUN dalam bentuk uang dan Penerimaan Hibah luar negeri sebesar Rp1.822.729.732.953 terdiri atas Penerimaan Hibah luar negeri melalui kuasa BUN sebesar Rp423.174.970.047 dan Penerimaan Hibah luar negeri tidak melalui kuasa BUN sebesar Rp1.399.554.762.906. Kenaikan realisasi Penerimaan Hibah terutama dipengaruhi meningkatnya hibah langsung dari pemerintah daerah dalam rangka pilkada tahun 2024 yang sudah dilakukan pembayaran tahun 2023.

B.2.2. Belanja BUN

Realisasi Belanja BUN Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.968.987.928.663.857 atau 99,43 persen dari anggaran sebesar Rp1.980.251.879.807.000. Realisasi Belanja BUN mengalami penurunan sebesar Rp42.600.138.337.596 atau 2,12 persen dari realisasi Belanja BUN tahun 2022 yang sebesar Rp2.011.588.067.001.453. Realisasi Belanja BUN terdiri dari (i) Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.087.557.384.455.403 dan (ii) Transfer ke Daerah sebesar Rp881.430.544.208.454.

B.2.2.1. Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.087.557.384.455.403 atau 99,55 persen dari anggaran sebesar Rp1.092.436.267.139.000. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mengalami penurunan sebesar Rp107.795.856.478.354 atau 9,02 persen dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat tahun 2022 yang sebesar Rp1.195.353.240.933.757. Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja antara lain terdiri atas: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Pembayaran Bunga Utang, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Lain-lain.

B.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai Tahun 2023 adalah sebesar Rp151.424.302.225.988 atau sebesar 99,84 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp151.661.953.816.000. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp6.664.013.628.922 atau 4,60 persen dari realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 sebesar Rp144.760.288.597.066. Realisasi Belanja Pegawai terdiri dari.

AKUN	Deskripsi AKUN	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik (Turun) %
513111	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS	28.632.610.811.947	28.708.952.780.365	(0,27)
513112	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Daerah	87.144.803.352.030	80.824.323.802.177	7,82
513113	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS TNI/Kemhan	2.482.805.232.818	2.449.026.969.361	1,38
513114	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri	610.326.988.068	577.282.870.255	5,72

AKUN	Deskripsi AKUN	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik (Turun) %
513115	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Eks Pegadaian	10.573.245.839	11.673.159.049	(9,42)
513121	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri (Lama)	1.890.634.169.233	2.114.051.485.392	(10,57)
513122	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Kemhan	8.792.673.649.905	8.551.605.807.983	2,82
513123	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Polri	5.316.453.430.700	5.047.615.383.020	5,33
513131	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara	145.625.689.704	150.072.407.722	(2,96)
513132	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Hakim	190.932.693.663	181.291.347.575	5,32
513141	Kontribusi APBN Sebagai Pendanaan Bersama Dalam Pembayaran Pensiun Eks PNS Kemhub pada PT KAI	568.323.764.079	588.347.901.631	(3,40)
513151	Belanja Tunjangan Veteran	2.205.690.658.950	2.417.937.343.216	(8,78)
513152	Belanja Dana Kehormatan Veteran	12.631.488.000	14.599.618.000	(13,48)
513153	Belanja Tunjangan PKRI dan KNIP	8.929.525.033	9.928.037.517	(10,06)
513161	Belanja Tunjangan Hari Tua (Unfunded Liability)	2.270.263.772.727	2.280.000.000.000	(0,43)
513211	Belanja Askes PNS	4.006.644.218.747	6.995.229.521.286	(42,72)
513212	Belanja Askes Pejabat Negara	281.412.332.313	240.868.500.000	16,83
513221	Belanja Askes Penerima Pensiun	3.200.147.268.718	-	100
513231	Belanja Askes TNI/Kemhan	1.327.514.605.819	1.308.400.570.182	1,46
513241	Belanja Askes Polri	1.405.372.494.197	1.373.462.473.491	2,32
513251	Belanja Askes Veteran	90.495.409.498	93.740.251.604	(3,46)
513271	Belanja Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai	294.187.728.596	296.023.538.027	(0,62)
513281	Belanja Program Jaminan Kematian Pegawai	535.249.695.404	525.854.829.213	1,79
Total		**151.424.302.225.988**	**144.760.288.597.066**	**4,60**

B.2.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.415.601.962.907 atau 90,73 persen dari anggaran sebesar Rp1.560.301.241.000. Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp166.424.311.710 atau 13,32 persen bila dibandingkan dengan Tahun 2022 yang sebesar Rp1.249.177.651.197. Rincian Belanja Barang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik (Turun) %
Satker TK DJPb (987361)	1.078.469.777.126	1.038.696.943.947	3,83
Satker TK BKF (984438)	225.654.456.440	74.579.839.600	202,57
Satker TK DJPPR (978010)	26.851.576.322	51.716.561.215	(48,08)
Satker TK DJKN (984515)	5.487.896.908	16.190.236.423	(66,10)
Satker TK DJPPR (999903)	1.401.380.000	1.463.345.000	(4,23)
Satker TK DJPPR (999982)	77.736.876.111	66.530.725.012	16,84
Jumlah	1.415.601.962.907	1.249.177.651.197	13,32

1. Belanja Barang satker TK DJPb pada Satker Ditjen Perbendaharaan (987361) sebesar Rp1.078.469.777.126 atau 92,64% dari anggarannya sebesar Rp1.164.117.254.000;

2. Belanja Barang pada satker TK BKF (984438) sebesar Rp225.654.456.440 atau 99,51 persen dari anggarannya sebesar Rp226.770.124.000. Rincian Anggaran, Realisasi Belanja, dan Konfirmasi Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023							Selisih
	Anggaran (DIPA)	Mata Uang	SP2D	Konfirmasi	Tgl SP2D	Kurs	SP2D (IDR)	
ADF	56.592.744.000	USD	3.943.600,00	3.943.600,00	25/01/2023	14.930,00	58.877.948.000	
AMTF	215.245.000	USD	15.000,00	14.972,50	17/02/2023	15.176,00	227.640.000	27,50
OFID	5.468.957.000	USD	380.000,00	380.000,00	28/02/2023	15.274,00	5.804.120.000	-
USAID Trust Fund	7.632.765.000	IDR	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	03/03/2023	1,00	5.000.000.000	-
GCF	84.383.000	USD	5.580,50	5.580,50	18/08/2023	15.308,00	85.426.294	-
ISFD	1.785.783.000	USD	118.099,50	118.099,50	18/08/2023	15.308,00	1.807.867.146	-
SOMTC Polri	3.780.250.000	USD	250.000,00	249.990,00	29/08/2023	15.294,00	3.823.500.000	10,00
Pandemic Fund FIF	151.209.997.000	USD	9.845.000,00	9.845.000,00	31/08/2023	15.239,00	150.027.955.000	-
JUMLAH	226.770.124.000						225.654.456.440	

3. Belanja Barang pada Satker DJPPR

   Realisasi belanja barang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp105.989.832.433 atau sebesar 66,32% dari pagu anggaran Tahun 2023 sebesar Rp159.818.851.000. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi Belanja Barang Kontribusi Fasilitas Penyiapan Proyek senilai Rp77.736.876.111; Belanja Barang Kompensasi Penugasan Dukungan Loss Limit Rp1.401.380.000; dan Belanja Barang Kontribusi Dana Dukungan Kelayakan Proyek Rp26.851.576.322.

   Adapun realisasi belanja barang pada tahun 2022 adalah Rp119.710.631.227 atau sebesasr 63,00% dari pagu senilai Rp190.009.420.000. Capaian realisasi tersebut terdiri dari realisasi Belanja Fasilitas Penyiapan Proyek senilai Rp66.530.725.012, Belanja Kompensasi Penugasan Dukungan Loss Limit Rp1.463.345.000 dan realisasi Belanja Dukungan Kelayakan senilai Rp51.716.561.215.

   Pada kurun waktu 2022 hingga 2023, tidak terdapat perubahan realisasi anggaran BA BUN Transaksi Khusus secara signifikan. Penurunan nilai realisasi disebabkan oleh alokasi dan realisasi Belanja Dukungan Kelayakan tahun 2023 yang lebih kecil dari tahun 2022. Namun demikian, realisasi untuk Belanja Fasilitas Penyiapan Proyek mengalami peningkatan disebabkan oleh peningkatan capaian hasil keluaran fasilitas yang direalisasikan di sepanjang tahun 2023 sehingga memberikan tambahan kontribusi jumlah penggantian biaya penugasan fasilitas penyiapan proyek kepada BUMN Pelaksana Penugasan. Pelaksanaan fasilitas penyiapan proyek juga mengalami peningkatan kualitas dengan adanya reviu Kementerian Keuangan yang dilakukan pada setiap hasil keluaran yang dihasilkan oleh Pelaksana Fasilitas. Lebih lanjut, penurunan alokasi pengelolaan dukungan loss limit terjadi karena terdapat penurunan pada komponen biaya transfer *knowledge*. Adapun untuk realisasi pengelolaan dukungan loss limit mencapai 100% sesuai dengan capaian rincian output PT RIU atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dukungan loss limit untuk tagihan periode bulan April, Agustus, dan Desember 2023.

4. Belanja Barang pada satker DJKN

   Realisasi belanja barang pada satker TK DJKN Tahun 2023 adalah sebesar Rp5.487.896.908 atau 57,20 persen dari anggaran sebesar Rp9.595.012.000, merupakan belanja penggantian biaya dan margin yang wajar IP PEN kepada pelaksana investasi.

Perjanjian investasi menyepakati penyampaian tagihan dari Pelaksana Investasi kepada DJKN pada bulan April dan Oktober. Realisasi penggantian biaya dan margin tahun 2023 merupakan pembayaran tagihan periode April 2023 kepada PT SMI, PT SMF, dan LPEI sesuai hasil reviu BPKP nomor PE.12.03/S-843/D1/01/2023 tanggal 23 Oktober 2023 atas tagihan Pelaksana Investasi periode November 2022 s.d. April 2023.

Selanjutnya tagihan periode Oktober 2023 telah direviu BPKP dengan surat nomor PE.12.03/S-144/D1/01/2024 tanggal 15 Maret 2024 dan direncanakan untuk dibayarkan pada bulan Mei 2024.

B.2.2.1.3. Belanja Pembayaran Bunga Utang

Realisasi belanja pembayaran bunga utang Tahun 2023 adalah sebesar Rp439.882.584.341.259 atau 99,66 persen dari anggaran sebesar Rp441.400.000.000.000. Realisasi belanja pembayaran bunga utang Tahun 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp53.540.764.551.444 atau 13,86 persen dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp386.341.819.789.815. Kenaikan tersebut seiring adanya pertambahan utang pada Tahun 2023. Realisasi tersebut terdiri dari pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp30.575.331.536.948 dan pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp409.307.252.804.311 yang terdiri dari pembayaran bunga utang Surat Berharga Negara sebesar Rp408.030.933.844.172 dan Pembayaran Bunga Utang Pinjaman Dalam Negeri senilai Rp1.276.318.960.139. Adapun komposisi belanja pembayaran bunga tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Jenis Belanja	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik (Turun) %
Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri	30.575.331.536.948	12.723.908.318.349	140,30
Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri	409.307.252.804.311	373.617.911.471.466	9,55
-Pembayaran Bunga SBN	408.030.933.844.172	373.085.036.199.041	9,37
-Pembayaran Bunga Utang Pinjaman Dalam Negeri	1.276.318.960.139	532.875.272.425	139,52
Jumlah	439.882.584.341.259	386.341.819.789.815	13,86

Realisasi Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri Tahun 2023 mengalami kenaikan 140,30 persen dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp17.851.423.218.599. Kenaikan tersebut karena adanya kenaikan utang program dan proyek di Tahun 2023. Rincian belanja pembayaran bunga utang luar negeri Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

KEGIATAN/SUBKEGIATAN /JENIS BELANJA/RINCIAN	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik (Turun) %
Belanja Bunga Pinjaman Program	15.872.411.363.545	5.665.757.064.090	180,15
Belanja Biaya/Kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program	169.262.862.242	218.165.618.289	(22,42)
Belanja Bunga Pinjaman Proyek	10.633.085.208.424	5.035.738.077.025	111,15
Belanja Biaya/Kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek	3.900.239.224.662	1.803.962.150.480	116,20
Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri	332.878.075	285.408.465	16,63
JUMLAH PEMBAYARAN BUNGA UTANG LUAR NEGERI	30.575.331.536.948	12.723.908.318.349	140,30

Realisasi pembayaran bunga SBN Tahun 2023 sebesar Rp408.030.933.844.172 dan Tahun 2022 sebesar Rp373.085.036.199.041. Realisasi Pembayaran Bunga SBN Tahun 2023 terdapat di dalamnya kontribusi BI atas *Public Goods* (PG) sebesar Rp24.356.844.960.000, kontribusi BI atas *Non-Public*

Goods (NPG) sebesar Rp987.248.928.896 dan Kontribusi BI atas *Cluster* A sebesar Rp6.022.602.621.230. Realisasi pembayaran bunga SBN Tahun 2023 mengalami kenaikan 9,37 persen dibandingkan realisasi Tahun 2022, hal ini disebabkan karena meningkatnya *outstanding* SBN.

Realisasi Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri Tahun 2023 sebesar Rp1.276.318.960.139 dan realisasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp532.875.272.425. Realisasi Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri mengalami kenaikan sebesar 139,52 persen dibandingkan realisasi Tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan pinjaman dalam negeri di Tahun 2023. Rincian belanja pembayaran bunga utang dalam negeri Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

KEGIATAN/SUBKEGIATAN /JENIS BELANJA/RINCIAN	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik (Turun) %
Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Rupiah	276.602.884.583.198	243.909.923.080.418	13,40
Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Obligasi Negara	242.515.144.295	190.937.201.909	27,01
Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri	1.276.318.960.139	532.875.272.425	139,52
Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas	42.065.189.258.483	38.945.153.546.632	8,01
Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara	43.726.664.053	61.668.253.633	(29,09)
Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang	69.535.481.128.261	60.305.171.837.356	15,31
Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya-Imbalan SBSN Jangka Panjang	307.098.351.120	201.608.457.712	52,32
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Valas	12.177.677.712.500	11.815.228.187.500	3,07
Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Imbalan SBSN Jangka Panjang Valas	22.242.447.640	27.846.305.423	(20,12)
Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara	1.468.337.011.000	1.392.880.725.000	5,42
Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara	1.138.430.387.136	9.047.825.130.195	(87,42)
Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Valas	841.964.472.192	749.166.902.746	12,39
Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara	536.653.910.900	444.585.600.000	20,71
Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Valas	-	892.867.201.614	100,00
Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang	2.719.227.753.394	4.900.097.616.903	(44,51)
Belanja Pembayaran Discount SPN Syariah	329.505.020.000	200.076.152.000	64,69
MBAYARAN BUNGA UTANG DALAM NEGERI	409.307.252.804.311	373.617.911.471.466	0,10

B.2.2.1.4. Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2023 adalah sebesar Rp269.592.086.053.747 atau 99,45 persen dari pagu anggarannya sebesar Rp271.079.597.815.000. Sedangkan realisasi Belanja Subsidi Tahun 2022 adalah sebesar Rp252.812.907.867.326 sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp16.779.178.186.421 atau sebesar 6,64 persen.

Rincian realisasi belanja subsidi menurut jenis subsidi Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik (Turun)	%
Subsidi Minyak Solar	16.573.537.577.398	10.126.760.761.603	6.446.776.815.795	63,66
Subsidi Minyak Tanah	4.716.272.138.615	5.097.998.717.227	(381.726.578.612)	(7,49)
Subsidi Elpiji	74.300.193.555.508	100.390.005.332.074	(26.089.811.776.566)	(25,99)
Subsidi Listrik	68.702.258.911.876	56.129.264.276.198	12.572.994.635.678	22,40
Subsidi PPh DTP	8.587.136.656.062	8.869.124.713.844	(281.988.057.782)	(3,18)
Subsidi Bunga KKP dan Energi	0	999.369.775	(999.369.775)	(100,00)
Subsidi Bunga Pinjaman CPP	863.768.416	0	863.768.416	1,00
Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)		15.692.064.973	(15.692.064.973)	(100,00)
Subsidi Risk Sharing KKPE		2.748.956.348	(2.748.956.348)	(100,00)
Subsidi Imbalan Jasa Penjamin KUR	39.496.119.024	0	39.496.119.024	100,00
Subsidi Kredit Sektor Peternakan	41.204.433	0	41.204.433	100,00
Subsidi Kredit Resi Gudang	2.142.819.505	1.078.021.248	1.064.798.257	98,77
Subsidi Pupuk	42.057.450.059.622	29.769.041.487.742	12.288.408.571.880	41,28
Subsidi PT KAI	2.524.521.565.006	3.324.045.262.688	(799.523.697.682)	(24,05)
Subsidi/PSO PT. PELNI	2.395.825.002.151	2.817.152.372.656	(421.327.370.505)	(14,96)
Subsidi PSO lainnya	172.000.950.000	168.293.494.000	3.707.456.000	2,20
Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	963.718.561	2.059.732.713	(1.096.014.152)	(53,21)
Subsidi Bunga KPR	3.457.315.411.888	2.570.570.451.675	886.744.960.213	34,50
Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	40.928.036.992.482	0	40.928.036.992.482	100,00
Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	895.000.000.000	929.968.000.000	(34.968.000.000)	(3,76)
Total Reguler	265.353.056.450.547	220.214.803.014.764	45.138.253.435.783	
Subsidi Bunga KUR - Penanganan Pandemi Covid-19	0	23.113.047.044.984	(23.113.047.044.984)	(100,00)
Subsidi Diskon Listrik- Penanganan Pandemi Covid-19	0	114.758.426.726	(114.758.426.726)	(100,00)
Subsidi Bunga Program PEN (DJPK) - Penanganan Pandemi Covid-19	160.320.970.852	155.176.756.597	5.144.214.255	3,32
Subsidi PPh-DTP-Penanganan Pandemi Covid-19	604.334.469.803	2.496.064.677.101	(1.891.730.207.298)	(75,79)
Subsidi PPN-DTP-Penanganan Pandemi Covid-19	2.028.573.395.855	3.258.885.627.759	(1.230.312.231.904)	(37,75)
Subsidi PPnBM-DTP-Penanganan Pandemi Covid-19	65.150.508.412	1.111.299.638.016	(1.046.149.129.604)	(94,14)
Subsidi IJP Program PEN(DJPPR) - Penanganan Pandemi Covid-19	1.380.650.258.278	2.348.872.681.379	(968.222.423.101)	(41,22)
Total PEN	*4.239.029.603.200*	*32.598.104.852.562*	(28.359.075.249.362)	(87,0)
Jumlah	**269.592.086.053.747**	**252.812.907.867.326**	**16.779.178.186.421**	**6,64**

Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2023 pada 7 (tujuh) Kementerian Negara/Lembaga sebagai berikut.

1. Kementerian Keuangan

Pada tahun 2023, Kementerian Keuangan menerima anggaran Belanja Subsidi sebesar Rp177.349.426.763.000. Realisasi belanja subsidi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp177.119.333.415.508 atau 99,87% dari pagu anggaran. Pada tahun 2022 realisasi belanja subsidi sebesar Rp190.117.651.999.620, sehingga apabila dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi belanja subsidi 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp12.998.318.584.112 atau minus 6,83%. Perbandingan Realisasi Belanja Subsidi pada Kementerian Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	UNIT ESELON I	Tahun 2023		Tahun 2022		Kenaikan/ (Penurunan)
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
1	Ditjen Anggaran	164.446.672.225.000	164.292.262.183.397	175.363.617.174.000	171.858.787.513.828	(4,4)
2	Ditjen Perbendaharaa	41.313.427.000	904.972.849	75.712.372.000	19.440.391.096	(95,3)
3	Ditjen Pajak	11.285.324.659.000	11.285.195.030.132	15.735.912.847.000	15.735.374.656.720	(28,3)
4	Ditjen PK	172.022.821.000	160.320.970.852	231.594.584.000	155.176.756.597	3,3
5	Ditjen PPR	1.404.093.631.000	1.380.650.258.278	2.494.035.076.000	2.348.872.681.379	(41,2)
	Total	177.349.426.763.000	177.119.333.415.508	193.900.872.053.000	190.117.651.999.620	(6,8)

Rincian Realisasi Belanja Subsidi pada Kementerian Keuangan per jenis subsidi Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/turun	%
Subsidi Minyak Solar	16.573.537.577.398	10.126.760.761.603	6.446.776.815.795	63,66
Subsidi Minyak Tanah	4.716.272.138.615	5.097.998.717.227	-381.726.578.612	(7,49)
Subsidi Elpiji	74.300.193.555.508	100.390.005.332.074	-26.089.811.776.566	(25,99)
Subsidi Listrik	68.702.258.911.876	56.129.264.276.198	12.572.994.635.678	22,40
Subsidi Diskon Listrik - Penanganan Pandemi covid-19	-	114.758.426.726	-114.758.426.726	(100,00)
Subsidi PPh DTP	8.587.136.656.062	8.869.124.713.844	-281.988.057.782	(3,18)
Subsidi PPh-DTP-Penanganan Pandemi covid-19	604.334.469.803	2.496.064.677.101	-1.891.730.207.298	(75,79)
Subsidi PPN-DTP-Penanganan Pandemi covid-19	2.028.573.395.855	3.258.885.627.759	-1.230.312.231.904	(37,75)
Subsidi PPnBM-DTP-Penanganan Pandemi covid-19	65.150.508.412	1.111.299.638.016	-1.046.149.129.604	(94,14)
IJP (DJPPR) - Penanganan Pandemi Covid-19	1.380.650.258.278	2.348.872.681.379	-968.222.423.101	(41,22)
Subsidi Bunga KKP dan Energi	-	999.369.775	-999.369.775	(100,00)
Subsidi Bunga Pinjaman CPP	863.768.416	-	863.768.416	100,00
Subsidi Bunga Risk Sharing KKPE	-	2.748.956.348	-2.748.956.348	(100,00)
Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	-	15.692.064.973	-15.692.064.973	(100,00)
Subsidi Kredit Sektor Peternakan	41.204.433	100.958.928	-59.754.495	(59,19)
Subsidi Kredit Resi Gudang	-	324.299.829	-324.299.829	(100,00)
Subsidi Bunga Program PEN (DJPK)	160.320.970.852	155.176.756.597	5.144.214.255	3,32
Jumlah	**177.119.333.415.508**	**190.118.077.258.377**	**-12.998.743.842.869**	**(6,84)**

a. Direktorat Jenderal Anggaran

Pagu Anggaran Subsidi Energi pada Direktorat Jenderal Anggaran tahun 2023 adalah sebesar Rp164.446.672.225.000. Realisasi Belanja Subsidi Energi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp164.292.262.183.397 atau 99,91% dari pagu anggarannya. Realisasi Belanja Subsidi Energi tersebut, Rp7.566.525.330.431 atau 4,4% lebih kecil dari realisasinya pada Tahun 2022 Rp171.858.787.513.828.

Realisasi pembayaran Subsidi Energi Tahun 2023 pada Direktorat Jenderal Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Keterangan	Anggaran	Realisasi	% APBN
1	Subsidi BBM	21.338.817.546.000	21.289.809.716.013	99,77
	a. Minyak Solar	16.573.537.578.000	16.573.537.577.398	100,00
	b. Minyak Tanah	4.765.279.968.000	4.716.272.138.615	98,97
2	Subsidi LPG 3 Kg	74.300.193.557.000	74.300.193.555.508	100,00
3	Subsidi Listrik	68.807.661.122.000	68.702.258.911.876	99,85
	a. Subsidi listrik	68.807.661.122.000	68.702.258.911.876	99,85
	b. Subsidi Listrik-Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	-
Jumlah		164.446.672.225.000	164.292.262.183.397	99,91

Realisasi pembayaran subsidi JBT pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp21.289.809.716.013 terdiri atas 2 jenis, yaitu Subsidi JBT Minyak Solar dan Subsidi JBT Minyak Tanah, dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

1) Pembayaran sebesar Rp16.573.537.577.398 merupakan pembayaran subsidi JBT Jenis Minyak Solar, yang terdiri atas:
   a) Rp15.474.002.051.983 merupakan pembayaran subsidi JBT Minyak Solar Tahun 2023 kepada PT Pertamina Patra Niaga ;
   b) Rp131.565.170.017 merupakan pembayaran subsidi JBT Minyak Solar Tahun 2023 kepada PT AKR Corporindo, Tbk.;
   c) Rp960.636.296.967 merupakan pembayaran kekurangan subsidi JBT Minyak Solar Tahun 2022 Hasil Audit BPK RI kepada PT Pertamina Patra Niaga;
   d) Rp7.334.058.431 merupakan pembayaran kekurangan subsidi JBT Minyak Solar tahun 2022 Hasil Audit BPK RI kepada PT AKR Corporindo, Tbk.
2) Pembayaran sebesar Rp4.716.272.138.615 merupakan pembayaran subsidi JBT Jenis Minyak Tanah, yang terdiri atas:
   a) Subsidi sebesar Rp4.082.082.564.330 merupakan pembayaran subsidi JBT Minyak Tanah (termasuk PPN) tahun 2023 kepada PT Pertamina Patra Niaga;
   b) Subsidi sebesar Rp634.189.574.285 merupakan pembayaran kekurangan subsidi JBT Minyak Tanah (termasuk PPN) tahun 2022 hasil audit BPK RI kepada PT Pertamina Patra Niaga;

   Total JBT yang disalurkan sampai dengan bulan Desember tahun 2023 berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan BPK RI adalah sebesar 18.054,185 ribu KL atau mencapai 103,17% dari kuota APBN tahun 2023 sebesar 17.500 ribu KL, terdiri dari minyak tanah sebesar 492,687 ribu KL dari kuota penyaluran sebesar 500 ribu KL dan minyak solar 17.561,498 ribu KL dari kuota penyaluran sebesar 17.000 ribu KL. Penyaluran JBT diupayakan dilakukan secara tepat sasaran dengan harga yang terjangkau, guna menjaga daya beli masyarakat dan menjaga kegiatan ekonomi skala mikro dan kecil agar tetap berjalan.

   Pembayaran subsidi JBT tahun berjalan pada periode tahun 2023 merupakan pembayaran kepada PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo, Tbk sampai dengan tagihan bulan November 2023.

   Sementara itu, realisasi pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg pada Periode Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp74.300.193.555.508, yang merupakan pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg tahun 2023 kepada PT Pertamina Patra Niaga terdiri atas subsidi harga sebesar Rp62.706.574.291.000 dan PPN atas penyerahan LPG Tabung 3 Kg oleh PT Pertamina Patra Niaga kepada Pemerintah sebesar Rp6.955.332.856.000 dan pembayaran kekurangan subsidi LPG Tabung 3 Kg tahun 2022 hasil audit BPK RI kepada PT Pertamina Patra Niaga terdiri atas subsidi harga sebesar Rp4.253.953.863.481 dan PPN atas penyerahan LPG Tabung 3 Kg oleh PT Pertamina Patra Niaga kepada Pemerintah sebesar Rp384.332.545.027.

Pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg tahun berjalan pada periode Tahun 2023 merupakan pembayaran kepada PT Pertamina Patra Niaga sampai dengan tagihan periode 1-15 Desember 2023. Sementara itu, jumlah LPG Tabung 3 Kg yang disalurkan sampai dengan bulan Desember 2023 berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan BPK RI adalah sebesar 8.043,80 juta Kg atau mencapai 100,58% dari kuota sebesar 8.000 juta Kg.

Realisasi pembayaran subsidi listrik pada Periode Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp68.702.258.911.876, yang terdiri atas pembayaran atas beban subsidi listrik tahun berjalan periode tagihan Januari s.d. Desember 2023 sebesar Rp64.024.930.585.373 dan pembayaran kekurangan subsidi listrik tahun 2022 sebesar Rp4.677.328.326.503.

b. Direktorat Jenderal Pajak

Realisasi belanja subsidi P-DTP tahun 2023 adalah sebesar Rp11.285.195.030.132 atau mencapai 100% dari pagu DIPA999.07.1.980522/2023 sebesar Rp11.285.324.659.000. Realisasi belanja subsidi P-DTP Tahun 2023 terdiri dari belanja subsidi P-DTP reguler sebesar Rp8.587.136.656.062 dan belanja subsidi P-DTP terkait program PC-PEN sebesar Rp2.698.058.374.070. Realisasi belanja subsidi P-DTP reguler Tahun 2023 terdiri dari belanja subsidi PPh DTP Panas Bumi sebesar Rp3.476.808.245.363 dan belanja subsidi PPh DTP SBN Valas sebesar Rp5.110.328.410.699. Kemudian, untuk realisasi belanja subsidi P-DTP terkait program PC-PEN Tahun 2023 terdiri dari belanja subsidi PPh DTP Pasal 21 sebesar Rp505.135.640.947, belanja subsidi PPh DTP Final WP P3-TGAI sebesar Rp124.800.000, belanja subsidi PPh DTP Final UMKM sebesar Rp99.074.028.856, belanja subsidi PPN DTP Non Vaksin sebesar Rp462.702.785.608, belanja subsidi PPN DTP atas Rumah Tapak dan Rumah Susun sebesar Rp708.945.410.159, belanja subsidi PPnBM DTP Kendaraan Bermotor sebesar Rp65.150.508.412, dan belanja subsidi PPN DTP Vaksin sebesar Rp856.925.200.088.

c. Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pagu Anggaran Subsidi Bunga Kredit Program pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp41.313.427.000. Realisasi Belanja Subsidi Bunga Kredit Program 31 Desember 2023 sebesar Rp904.972.849 atau 2,19% dari pagu anggarannya. Realisasi Belanja Subsidi Bunga Kredit Program tersebut, Rp18.535.418.247 (95,3%) lebih kecil dari realisasinya pada Tahun 2022 Rp19.440.391.096.

a. Rendahnya penyerapan/realisasi belanja subsidi disebabkan oleh kondisi sebagai berikut:
   Subsidi Cadangan Pangan Pemerintah yang sudah dianggarkan di tahun 2023 tidak dapat disalurkan karena tidak adanya pengajuan pinjaman dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada perbankan;
b. Surat tagihan yang masuk pada tahun 2023 lebih sedikit jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan telah selesainya masa kredit subsidi skema lama seperti KKPE, KPEN RP, KUPS.

d. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Realisasi belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) tahun 2023 sebesar Rp Rp1.380.650.258.278 atau 98,33 persen dari anggaran sebesar Rp1.404.093.631.000. Realisasi pembayaran belanja subsidi tersebut merupakan realisasi atas tagihan Imbal Jasa Penjaminan untuk periode Januari s.d. Desember 2023 sebesar Rp1.292.306.693.219 dan tagihan Imbal Jasa Penjaminan Desember 2022 sebesar Rp88.343.565.059.

e. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Realisasi Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah tahun 2023 sebesar Rp160.320.970.852 atau 93,20% dari pagu anggarannya sebesar Rp172.022.821.000. Capaian realisasi Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah yang rendah disebabkan oleh rendahnya pencairan dana pinjaman daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dimana untuk pencairan pinjaman, pemerintah daerah harus memenuhi persyarat efektif pinjaman dan persyaratan pencairan per tahap. Sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat 29 pemerintah daerah yang melakukan pencairan dana pinjaman daerah dari 32 pemerintah daerah yang telah melakukan penandatanganan perjanjian pemberian pinjaman daerah dalam rangka mendukung program PEN dengan PT SMI.

2. Kementerian Pertanian

Realisasi belanja subsidi tahun 2023 sebesar Rp42.057.450.059.622 atau 98,72 persen dari pagu Anggaran sebesar Rp42.602.791.364.000. Pada Tahun 2022 realisasi belanja subsidi sebesar Rp29.769.041.487.742 sehingga apabila dibandingkan dengan 2023, realisasi belanja subsidi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp12.288.408.571.880 atau 41,28 persen.

Rincian pagu dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

JENIS BELANJA SUBSIDI	PAGU	REALISASI	%
Belanja Subsidi Benih	0	0	-
Belanja Subsidi Pupuk	42.602.791.364.000	42.057.450.059.622	98,72
TOTAL	42.602.791.364.000	42.057.450.059.622	98,72

Perbandingan Realisasi Belanja Subsidi Benih dan Pupuk Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Uraian Jenis Belanja	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
Subsidi Benih	0	0	0	0,00
Subsidi Pupuk	42.057.450.059.622	29.769.041.487.742	12.288.408.571.880	41,28
Jumlah	**42.057.450.059.622**	**29.769.041.487.742**	**12.288.408.571.880**	**41,28**

a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Pengelolaan Belanja Subsidi Benih di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sejak Tahun 2018 sudah tidak mendapat alokasi anggaran karena sudah teralokasi pada Bagian Anggaran 018 (Belanja Sektoral melalui APBN) melalui bantuan benih untuk mendukung kegiatan Mandiri Benih Seribu Desa.

b. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Pada tanggal 03 Januari 2023 terbit DIPA awal dengan mengalokasikan anggaran senilai Rp25.276.635.119.000 untuk memenuhi Total Alokasi Pupuk Bersubsidi sebanyak 6.680.286 ton. Sedangkan alokasi berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 734/KPTS/SR.320/M/09/2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023 sebanyak 9.013.706 ton. Pada tanggal 17 Januari 2023 ditandatangani Perjanjian antara Kuasa Pengguna Anggaran Satker Subsidi Pupuk Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA. 2023 yang menetapkan nilai subsidi senilai Rp25.276.626.564.788, sehingga terdapat selisih sisa pagu senilai Rp8.554.212 dengan DIPA awal. Nilai subsidi diperhitungkan berdasarkan selisih Harga Pokok Penjualan (HPP) dengan Harga Eceran Tertinggi dikalikan volume Pupuk Bersubsidi.

Pada tanggal 13 Desember 2023 DIPA mengalami perubahan Revisi ke 1 yang mengalokasikan anggaran Rp41.645.132.425.000 termasuk pembayaran Kurang Bayar TA. 2022 senilai Rp16.368.497.306.000. Pada tanggal 22 Desember 2023 DIPA Revisi mengalami perubahan ke 2 dengan mengalokasikan anggaran senilai Rp42.602.791.364.000, bertambah dari revisi sebelumnya senilai Rp957.658.939.000 dengan Total Alokasi Pupuk Bersubsidi sebanyak 7.776.281 ton merupakan subsidi pupuk dan 88.269 liter merupakan subsidi pupuk cair.

3. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Realisasi belanja subsidi tahun 2023 sebesar Rp172.000.950.000 atau sebesar 99,49 persen dari pagu Anggaran sebesar Rp172.874.280.000. Pada Tahun 2022 realisasi belanja subsidi sebesar Rp168.293.494.000 sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2023, realisasi belanja subsidi 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.707.456.000 atau 2,2 persen. Hal ini disebabkan adanya kenaikan harga untuk beberapa produk yang telah terealisasi pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kewajiban Pelayanan Publik untuk Informasi Publik Bidang Pers Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Harga Produk dan Konstruksi Program Kewajiban Pelayanan Publik untuk informasi publik Bidang Pers Tahun Anggaran 2023.

4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Alokasi Anggaran Belanja Subsidi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp4.353.531.548.000. Realisasi Belanja Subsidi tahun 2023 sebesar Rp4.353.483.718.561, terdapat pengembalian belanja sebesar Rp204.588.112 sehingga realisasi belanja subsidi netto Tahun 2023 sebesar Rp4.353.279.130.449. Sementara itu, realisasi Belanja Subsidi netto Tahun 2022 sebesar Rp3.502.598.184.388. Sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2022, realisasi Belanja Subsidi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp850.680.946.061 atau 24,29 persen.

5. Kementerian Perhubungan

Alokasi Anggaran Belanja Subsidi Kementerian Perhubungan sebesar Rp5.550.316.193.000. Realisasi Belanja Subsidi 31 Desember 2023 sebesar Rp4.920.346.567.157 atau 88,65 persen dari pagu anggarannya, sedangkan realisasi Belanja Subsidi Tahun 2022 sebesar Rp6.141.197.635.344. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022, realisasi Belanja Subsidi tahun

2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.220.851.068.187 atau 19,88 persen. Pagu dan realisasi per jenis subsidi pada Kementerian Perhubungan tahun 2023 sebagaimana dalam tabel berikut.

Jenis Subsidi	Tahun 2023		Realisasi Tahun 2022	Naik/(Turun)	%
	Anggaran	Realisasi 2023			
Subsidi PSO PT KAI	3.154.490.594.000	2.524.521.565.006	3.324.045.262.688	(799.523.697.682)	(24,05)
Subsidi PSO PT PELNI	2.395.825.599.000	2.395.825.002.151	2.817.152.372.656	(421.327.370.505)	(14,96)
Jumlah	5.550.316.193.000	4.920.346.567.157	6.141.197.635.344	(1.220.851.068.187)	(19,88)

6. Kementerian Perdagangan

Alokasi anggaran Belanja Subsidi Kementerian Perdagangan tahun 2023 sebesar Rp2.264.496.000. Realisasi Belanja Subsidi tahun 2023 sebesar Rp2.142.819.505 atau 94,63 persen dari pagu anggarannya, sedangkan Tahun 2022 tidak memperoleh alokasi belanja subsidi.

Belanja subsidi ini digunakan untuk pembiayaan Belanja Subsidi Kredit Resi Gudang (kode 552143) yang baru pertama kali dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi pada Tahun 2023 ini setelah dialihkan dari Dit. Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

7. Kementerian Koperasi dan UKM

Pada 31 Desember 2023 Kementerian Koperasi dan UKM menerima alokasi dana Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Subsidi sebesar Rp41.048.393.171.000. Realisasi Belanja Subsidi 31 Desember 2023 sebesar Rp40.967.533.111.506 atau 99,80 persen dari pagu anggarannya, sedangkan realisasi Belanja Subsidi Tahun 2022 sebesar Rp23.113.047.044.984. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022, realisasi Belanja Subsidi 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp17.854.486.066.522 atau 77,25 persen. Realisasi sebesar 40.967.533.111.506 merupakan realisasi atas IJP KUR dan subsidi bunga/subsidi marjin KUR sampai dengan 31 Desember 2023. Nilai tersebut terdiri dari beban periode tahun sebelumnya sebesar 13.449.272.532.591 dan beban tahun berjalan sebesar 27.518.260.578.915.

B.2.2.1.5. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 adalah sebesar Rp219.140.718.777 atau 92,00 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam DIPA Tahun 2023 sebesar Rp238.197.041.000. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp5.584.131.777.866 atau 96,22 persen dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp5.803.272.496.643. Realisasi Belanja Hibah pada tahun 2023 jauh lebih kecil daripada realisasi Belanja Hibah pada tahun 2022 terutama karena Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah tidak lagi dikonsolidasikan pada UAP BUN BA 999.02. Mulai tahun 2023, pengelolaan Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah dialihkan ke BA BUN 999.05 (Pengelolaan Transfer ke Daerah). Perbandingan realisasi belanja hibah Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2022	% NAIK (TURUN)
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	69.824.315.937	33.829.048.077	106,40
Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional	149.215.239.063	13.676.743.266	991,01
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah	-	5.755.516.300.341	(100,00)
Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Terkait Pendapatan/Belanja Hibah	101.163.777	250.404.959	(59,60)
Jumlah Belanja	219.140.718.777	5.803.272.496.643	(96,22)

B.2.2.1.6. Belanja Lain-Lain

Realisasi Belanja Lain-Lain Tahun 2023 sebesar Rp225.023.669.152.725 atau sebesar 99,35 persen dari DIPA Tahun 2023 sebesar Rp226.496.217.226.000. Realisasi Belanja Lain-lain terdapat pada BA BUN 999.08 dan 999.99. Dibandingkan dengan Tahun 2022, Realisasi Belanja Lain-lain Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp179.362.105.378.985 atau 44,35 persen dari Tahun 2022 sebesar Rp404.385.774.531.710. Rincian realisasi Bruto Belanja Belanja Lain-Lain adalah sebagai berikut.

Uraian	Realisasi Belanja		Selisih	Kenaikan/ (Penurunan) %
	2023	2022		
UAP BUN Belanja Lain-lain (999.08)	*224.316.238.098.211*	*403.761.307.996.530*	(179.445.069.898.319)	*(44,44)*
Belanja Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua	115.898.315.312	118.638.882.514	(2.740.567.202)	*(2,31)*
Belanja Lain-lain BUN Lainnya	206.073.493.135.814	379.319.425.364.154	(173.245.932.228.340)	*(45,67)*
Belanja Lain-lain	5.251.702.041.664	2.400.412.698.186	2.851.289.343.478	*118,78*
Belanja Cadangan Pangan Pemerintah	12.875.144.605.421	5.541.378.587.250	7.333.766.018.171	*132,35*
Belanja Lain-lain Program Kartu Prakerja-Penanganan Dampak Pandemi COVID-19	-	16.362.629.363.174	(16.362.629.363.174)	*(100,00)*
Belanja Lain-lain Pembayaran Dana Bantuan - Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Dampak Pandemi COVID-19	-	18.823.101.252	(18.823.101.252)	*(100,00)*
UAP BUN Transaksi Khusus (999.99)	*707.431.054.514*	*624.466.535.180*	82.964.519.334	*13,29*
Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	546.650.473.751	530.818.155.739	15.832.318.012	*2,98*
Belanja Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D dan Exotic Currency	694	2.766	(2.072)	*(74,91)*
Belanja Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	121.245.799.637	93.648.376.675	27.597.422.962	*29,47*
Belanja Lain-lain Penggunaan PNBP BUN	39.534.780.432	-	39.534.780.432	*100,00*
Realisasi Belanja Neto	225.023.669.152.725	404.385.774.531.710	(179.362.105.378.985)	*(44,35)*

Realisasi Belanja Lain-lain Tahun 2023 pada BA 999.08 di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Belanja Cadangan Pangan Pemerintah, pada satker Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan.Realisasi belanja tahun 2023 ini adalah sebesar Rp12.875.144.605.421 atau sebesar 100% dari alokasi anggaran sebesar Rp12.875.144.609.000. Realisasi tersebut untuk menyelesaikan pembayaran utang kepada pihak ketiga sebesar Rp3.101.577.212.413 (dengan rincian Penyelesaian Tunggakan KPSH Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2021-2022 sebesar Rp2.692.311.311.693 Biaya Pengarungan dan Distribusi Bantuan Beras Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Tahun 2021 sebesar Rp382.216.934.728 dan Sisa Tunggakan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Bencana Alam 2022 sebesar Rp27.048.965.992), Penyaluran Bantuan Pangan Beras Tahap I 2023 sebesar Rp7.759.306.912.205 dan Penyaluran CPP untuk SPHP Triwulan I-III TA 2023 sebesar Rp2.014.260.480.803.

   Pada Rabu, 27 September 2023 telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-508/KPN.1207/2023 yang diserahkan dari KPA BUN Penyalur Dana Cadangan Pangan Pemerintah kepada Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan selaku KPA BUN Dana Cadangan Pangan Pemerintah. Berdasarkan BAST tersebut, menerima kewajiban atas utang kepada pihak ketiga sebesar Rp3.101.577.212.413 dengan rincian Penyelesaian Tunggakan KPSH Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2021-2022 sebesar Rp 2.692.311.311.693, Biaya Pengarungan dan Distribusi Bantuan Beras Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Tahun 2021 sebesar Rp382.216.934.728 dan Sisa Tunggakan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Bencana Alam 2022 sebesar Rp27.048.965.992. Penetapan nilai tersebut berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perhitungan Harga Pembelian Beras Cadangan Pangan Pemerintah Tahun Anggaran 2022 Pada Perum Bulog. Satuan kuatum ketiga kegiatan tersebut adalah paket. Hal tersebut sesuai dengan hutang yang sudah disepakati oleh Kementerian Keuangan sebagai hutang negara terhadap Perum BULOG.

2. Belanja Ongkos Angkut Beras (OAB) PNS Distrik Pedalaman Papua, pada satker Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat selaku KPA. Pada Tahun 2023, realisasi OAB Papua sebesar Rp115.898.315.312 atau 79,91% dari anggaran sebesar Rp145.036.314.000. Sementara itu, realisasi OAB Papua Barat sebesar Rp16.792.674.340 atau 96,41% dari anggaran sebesar Rp17.418.606.000.

3. Belanja Lain-lain BUN Lainnya (Dana Kompensasi) pada satker Dit. PNBP SDA KND, merupakan pembayaran utang kompensasi dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp206.073.493.135.814 dengan rincian:

No	Nama Operator	Jenis	Periode	Nilai
1	PT. Pertamina (Persero)	Solar	2022	35.823.174.618.999
2	PT. Pertamina (Persero)	Pertalite	2022	13.317.579.839.913
3	PT AKR Corporindo, Tbk.	Solar	2022	287.432.920.970
4	PT PLN (Persero)	Listrik	2022	16.770.789.494.089
5	PT. Pertamina (Persero)	Solar	Triwulan I 2023	20.499.682.729.955
6	PT. Pertamina (Persero)	Pertalite	Triwulan I 2023	11.407.313.519.507
7	PT. Pertamina (Persero)	Solar	Triwulan II 2023	11.675.957.591.497
8	PT. Pertamina (Persero)	Pertalite	Triwulan II 2023	11.160.842.026.150
9	PT. Pertamina (Persero)	Solar	Triwulan III 2023	16.639.795.715.141
10	PT. Pertamina (Persero)	Pertalite	Triwulan III 2023	11.344.274.731.432
11	PT AKR Corporindo, Tbk.	Solar	Triwulan I 2023	169.435.772.363
12	PT AKR Corporindo, Tbk.	Solar	Triwulan II 2023	87.564.156.286
13	PT AKR Corporindo, Tbk.	Solar	Triwulan III 2023	141.364.900.739
14	PT PLN (Persero)	Listrik	Triwulan I 2023	18.387.491.971.936
15	PT PLN (Persero)	Listrik	Triwulan II 2023	19.340.393.528.057
16	PT PLN (Persero)	Listrik	Triwulan III 2023	18.451.196.536.095
17	PT. Pertamina (Persero)	Koreksi	2021	569.203.082.685*)
Jumlah				**206.073.493.135.814**

*) Koreksi sebesar Rp569.203.082.685 terdiri atas kompensasi BBM Premium Jamali 2021 sebesar Rp574.993.620.400, kompensasi BBM Premium Eks Pertalite 2021 sebesar Rp1.948.149.189 dan set off atas kelebihan pembayaran Kompensasi JBT Minyak Solar Tahun 2021 sebesar Rp7.738.686.904.

4. Belanja Lain-Lain neto sebesar Rp5.234.909.367.324 dengan rincian realisasi sebagai berikut.

   a. Istana Kepresidenan, Kementerian Sekretariat Negara, sebesar Rp142.455.336.000 dengan pengembalian Rp6.457.075.692 sehingga realisasi neto adalah Rp135.998.260.308 atau 86,88% dari anggaran sebesar Rp156.527.736.000.

   b. Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, sebesar Rp31.503.248.000 dengan pengembalian Rp95.064.514 sehingga realisasi neto adalah Rp31.408.183.486 atau mencapai 99,70% dari anggaran Rp31.503.248.000.

   c. Direktorat PPI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebesar Rp366.120.584.924 atau 96,79% dari anggaran belanja sebesar Rp378.269.521.000 yang dipergunakan untuk penyelenggaraan Layanan Pos Universal di 2.460 KPC LPU.

   d. DKPBPB Batam, sebesar Rp236.631.715.539 dengan pengembalian Rp29.093.607 sehingga realisasi neto adalah Rp236.602.621.932 atau 96,01% dari pagu anggaran sebesar Rp246.442.623.000. dibandingkan dengan TA 2022, realisasi Belanja TAHUN 2023

mengalami penurunan sebesar 1,72%. Penurunan terhadap realisasi anggaran disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya terkait dana *revolving* UP yang sedikit lebih lambat diajukan setiap bulannya.

e. Satuan Kerja Khusus Migas, sebesar Rp1.705.001.453.532 dengan pengembalian sebesar Rp2.215.858.839 sehingga realisasi neto adalah sebesar Rp1.702.785.594.693 atau 99,02% dari anggaran sebesar Rp1.719.660.393.000. Realisasi Belanja Lain-Lain TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,34% dari periode TA 2022. Hal ini disebabkan adanya kenaikan realisasi belanja layanan dukungan manajemen pada Satker SKK Migas.

f. Satker Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) sebesar Rp5.495.570.929.229 dengan pengembalian sebesar Rp2.733.576.807.248 sehingga realisasi neto adalah sebesar Rp2.761.994.121.981 atau 63,19% dari anggaran sebesar Rp4.371.000.000.000. Pengembalian terdiri dari Pengembalian Belanja Implementasi Pelatihan dan insentif Program Kartu Prakerja sebesar Rp2.733.457.636.300 dan pengembalian belanja atas Penyelenggaraan Operasional Manajemen Pelaksana sebesar Rp119.170.948.

Realisasi Belanja Lain-Lain pada BA 999.99 Tahun 2023 sebesar Rp707.431.054.514 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Pembayaran Selisih Harga Bulog sebesar Rp121.245.799.637 pada Satker 987361. Belanja ini berasal dari Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran selisih lebih atau kurang antara nilai HPB Pemerintah yang digunakan dalam potongan beras dalam bentuk natura pada gaji pegawai (PFK) yang sudah dibayarkan oleh KPA BUN kepada Perum Bulog dibandingkan dengan dengan nilai HPB Pemerintah yang seharusnya dibayar KPA BUN kepada Perum Bulog.
2. Belanja Karena Rugi Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN sebesar Rp546.650.473.751.
3. Belanja Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D dan Exotic Currency sebesar Rp694.
4. Belanja Lain-lain Penggunaan PNBP BUN PKN Rp39.534.780.432 atau 10,97 persen dari anggaran sebesar Rp360.475.232.000. Belanja penggunaan PNBP BUN PKN mulai direalisasikan di tahun 2023 dengan diterbitkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2023 tanggl 9 Februari 2023 hal Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Bendahara Umum Negara Pengelolaan Kas Negara. Rincian Penggunaan Dana PNBP BUN PKN tahun 2023 sebagai berikut.

No	Instansi Pengguna	Anggaran	Realisasi	%
1	**DJA**			
a	Direktorat PNBP K/L	5.184.773.000	3.891.931.743	75,06
b	Direktorat Sistem Penganggaran	241.610.000	227.390.000	94,11
	Jumlah belanja DJA	5.426.383.000	4.119.321.743	75,91
2	**Inspektorat Jenderal (Itjen)**			
a	Inspektorat Bidang Investigasi	1.410.279.000	686.898.240	48,71
b	Inspektorat I	674.970.000	537.232.411	79,59
c	Inspektorat II	170.924.000	125.589.263	73,48
d	Inspektorat III	1.677.912.000	1.455.278.188	86,73
e	Inspektorat IV	2.042.249.000	1.644.221.667	80,51
f	Inspektorat V	2.830.724.000	1.588.082.381	56,10
g	Inspektorat VI	586.750.000	467.555.191	79,69
h	Inspektorat VII	4.426.214.000	2.129.422.276	48,11
i	Sekretariat Itjen	9.330.242.000	5.231.766.042	56,07

No	Instansi Pengguna	Anggaran	Realisasi	%
	Jumlah belanja Itjen	23.150.264.000	13.866.045.659	59,90
3	**Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek)**			
	Jumlah belanja Pusintek	1.489.566.000	1.320.811.590	88,67
4	**DJPb**			
a	Bagian Keuangan Sekretariat DJPb	15.007.542.000	427.104.100	2,85
b	Bagian Umum Sekretariat DJPb	36.275.060.000	-	0,00
c	Bagian OTL Sekretariat DJPb	9.848.433.000	4.072.702.400	41,35
d	Direktorat PKN	25.266.121.000	8.263.041.502	32,70
e	Direktorat SITP	242.404.950.000	6.602.006.615	2,72
f	Direktorat SP	1.606.913.000	1.089.784.476	67,82
g	Jumlah belanja DJPB	330.409.019.000	20.454.639.093	6,19
5	**Pengembalian belanja**		**(226.037.653)**	
6	**Jumlah belanja neto penggunaan PNBP BUN PKN (1+2+3+4-5)**		**39.534.780.432**	**10,97**

B.2.2.2. Transfer ke Daerah

Realisasi belanja Transfer ke Daerah sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp881.430.544.208.454 atau 99,28 persen dari anggaran sebesar Rp887.815.612.668.000. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp816.234.826.067.696, realisasi belanja Transfer ke Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp65.195.718.140.758 atau 7,99 persen. Sesuai PMK Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, penyaluran transfer ke daerah (TKD) yang mencakup DBH dan/atau DAU dapat dilakukan dalam bentuk nontunai berupa Treasury Deposit Facility (TDF). TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh BUN bagi Pemda untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai berupa TDF dilakukan dalam rangka meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang sehat, efisien, dan efektif melalui pengendalian kas untuk mengoptimalkan belanja pemerintah, serta untuk mengurangi kas simpanan pemda di perbankan dalam jumlah tidak wajar. Teknis pelaksanaan DBH/DAU nontunai melalui fasilitas TDF diatur dalam PMK Nomor 19/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi hasil dan/atau Dana Alokasi Umum/yang disalurkan secara nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*, yang diantaranya mengatur bahwa dalam rangka penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan perkiraan saldo kas untuk menentukan Daerah dan besaran DBH dan/atau DAU yang akan disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF, serta batas saldo kas.

Transfer ke Daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Desa, dan Insentif Daerah sebagaimana tabel berikut.

Jenis Dana	Tahun 2023			Tahun 2022	Naik/ Turun (%)
	Pagu	Realisasi	%		
Transfer ke Daerah					
A. Dana Bagi Hasil	205.888.399.698.000	205.666.564.020.630	99,89%	168.414.110.278.434	22,12
B. Dana Alokasi Umum	398.162.039.057.000	398.029.628.594.542	99,97%	378.000.000.000.000	5,30
C. Dana Alokasi Khusus	187.103.910.343.000	181.357.561.783.241	96,93%	173.164.641.054.831	4,73
1. Transfer DAK Fisik	53.422.463.835.000	50.334.741.347.305	94,22%	54.783.954.054.112	(8,12)
2. Transfer DAK Non Fisik	130.214.110.762.000	128.081.946.376.309	98,36%	118.380.687.000.719	8,19
3. Hibah Kepada Daerah	3.467.335.746.000	2.940.874.059.627	84,82%	0	1,00
D. Dana Otonomi Khusus	17.241.263.570.000	17.241.263.570.000	100,00%	20.436.263.570.000	(15,63)
E. Dana Keistimewaan DIY	1.420.000.000.000	1.372.725.809.224	96,67%	1.320.000.000.000	3,99
F. Dana Desa	70.000.000.000.000	69.856.768.617.317	99,80%	67.906.138.390.431	2,87
G. Insentif Fiskal	8.000.000.000.000	7.906.031.813.500	98,83%	6.993.672.774.000	13,05
Jumlah	887.815.612.668.000	881.430.544.208.454	99,28%	816.234.826.067.696	7,99

Rincian Realisasi Transfer Daerah per Akun Tahun 2023 dapat dilihat di Lampiran LB3 dan Rincian Realisasi Transfer Daerah per Daerah Tahun 2023 dapat dilihat di Lampiran LB4.

B.2.2.2.1. Dana Bagi Hasil

Realisasi transfer DBH sampai dengan 31 Desember TA 2023 sebesar Rp205.666.564.020.630 atau sebesar 99,89 persen dari pagu anggaran sebesar Rp205.888.399.698.000. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp168.414.110.278.434, realisasi pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp37.252.453.742.196 atau 22,12 persen. Naiknya realisasi tersebut dikarenakan pada Tahun Anggaran 2023 terdapat kebijakan penambahan pagu Kurang Bayar DBH. Realisasi DBH per-Daerah dapat dilihat di **Lampiran LRA LB6**. Berikut tabel rincian realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2023:

Jenis Dana	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022	Naik/ Turun (%)
	Pagu	Realisasi	%		
A. DBH Pajak	69.814.195.396.000	69.722.008.418.530	99,87%	67.590.162.805.658	3,15
1. DBH PPh OP	41.526.659.300.000	41.526.659.300.000	100,00%	37.677.680.471.742	10,22
2. DBH PBB	22.319.338.323.000	22.319.338.323.000	100,00%	25.321.008.091.173	(11,85)
3. DBH CHT	5.968.197.773.000	5.876.010.795.530	98,46%	4.591.474.242.743	27,98
B. DBH Sumber Daya Alam	132.869.427.794.000	132.739.779.094.100	99,90%	100.823.947.472.776	31,66
1. DBH Minyak Bumi	16.491.258.147.000	16.491.258.147.000	100,00%	14.388.156.301.036	14,62
2. DBH Gas Bumi	11.738.041.628.000	11.738.041.628.000	100,00%	13.022.127.844.187	(9,86)
3. DBH Minerba	99.425.415.550.000	99.425.415.550.000	100,00%	68.713.989.486.607	44,69
4. DBH Panas Bumi	2.005.232.650.000	2.005.232.650.000	100,00%	1.726.630.460.219	16,14
4. DBH Kehutanan	2.113.842.034.000	1.984.193.334.100	93,87%	1.868.480.715.683	6,19
5. DBH Perikanan	1.095.637.785.000	1.095.637.785.000	100,00%	1.104.562.665.044	(0,81)
C. DBH Lainnya	3.204.776.508.000	3.204.776.508.000	100,00%		100,00
Jumlah	205.888.399.698.000	205.666.564.020.630	99,89%	168.414.110.278.434	22,12

Rincian Realisasi Anggaran untuk DBH Pajak disajikan pada Lampiran LB7 dan DBH SDA per Daerah disajikan pada Lampiran LB8.

Realisasi Dana Bagi Hasil yang mengalami kenaikan cukup signifikan di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022, adalah DBH Minerba yaitu sebesar Rp30.711.426.063.393 atau sebesar 44,69 persen yang disebabkan kenaikan tarif royalti batubara sebagai dampak implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022.

DBH Lainnya merupakan DBH jenis baru yang dihasilkan dari hasil perkebunan sawit. DBH ini baru dialokasikan dan disalurkan pada tahun 2023 berdasarkan PMK 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sawit.

Realisasi DBH TA 2023 tersebut, antara lain merupakan penyaluran DBH secara nontunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp67.185.170.994.000. Penyaluran DBH nontunai tersebut terdiri dari penyaluran atas Kurang Bayar DBH sesuai dengan KMK Nomor 38/KM.7/2023 sebesar Rp39.900.904.377.000 dan penambahan alokasi DBH berdasarkan PMK No. 159 Tahun 2023 sebesar Rp27.284.266.617.000.

B.2.2.2.2. Dana Alokasi Umum

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2023 sebesar Rp398.029.628.594.542. Realisasi DAU tahun 2023 dari pagu anggaran sebesar Rp398.162.039.057.000 mencapai 99,97 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp378.000.000.000.000, realisasi pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp20.029.628.594.542 atau 5,30 persen. Meningkatnya realisasi DAU TA 2023 terutama disebabkan amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang menyatakan penerapan DAU tidak boleh mengakibatkan penurunan alokasi DAU per Daerah paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya ketentuan berdasarkan Undang-undang tersebut. Pada Tahun 2023 juga terdapat kebijakan DAU Tambahan untuk penggantian komponen THR dan Gaji 13 berupa 50 persen TPG dan/atau Tamsil khusus bagi Guru yang mendapatkan gaji dari APBD dan tidak menerima tunjangan kinerja daerah/TPP sebesar Rp2.162.039.188.656 berdasarkan KMK Nomor 464 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023.

Realisasi DAU yang melampaui anggaran antara lain berasal dari adanya tambahan alokasi anggaran untuk Tambahan DAU, yang dialokasikan dari Satker Pengelolaan Belanja Lainnya (99908). Rincian Realisasi Anggaran DAU Tahun 2023 per pemerintah daerah disajikan pada **Lampiran LB9**.

Realisasi Transfer DAU sampai dengan 31 Desember 2023 merupakan realisasi bruto yang didalamnya termasuk pemotongan atas penyaluran DAU dengan jumlah pemotongan sebesar Rp3.279.921.117.524,00. Pemotongan DAU dilaksanakan berdasarkan:

1. KMK 6/KM.7/2021 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Kabupaten Aceh Timur sebagai Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Kabupaten Aceh Timur kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp16.563.661.200,00. Pemotongan dilaksanakan pada penyaluran DAU bulan Januari s.d. bulan Desember 2023 Kabupaten Aceh Timur setiap bulan sebesar Rp1.380.305.100,00.
2. KMK 45/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga Atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk Periode Penyaluran Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2023 untuk 56 Pemda sebesar Rp2.372.822.109.836,00. Pemotongan dilaksanakan pada penyaluran DAU bulan Januari s.d. Desember 2023.
3. KMK 2/KM.7/2023 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 Untuk Periode Penyaluran Bulan Februari Sampai Dengan Bulan Desember

Tahun 2023 untuk 10 Daerah sebesar Rp203.659.311.527,00. Pemotongan tersebut dilaksanakan pada penyaluran DAU Bulan Januari sampai dengan November 2023.

4. KMK 14/KM.7/2023 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bali tahun 2020 serta pembayaran kembali pokok dan/atau pembayaran bunga atas pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah Kabupaten Gianyar, Kabupaten LombokTengah, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Muna tahun 2021 untuk periode penyaluran bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2023 untuk 6 Pemda sebesar Rp331.295.010.726,00. Pemotongan dilaksanakan pada penyaluran DAU bulan Juli s.d. Desember 2023.
5. KMK 18/KM.7/2023 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Dan Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 serta Pembayaran Kembali Pokok Dan/Aatau Pembayaran Bunga Atas Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Kota Tomohon dan Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk Periode Penyaluran Bulan Agustus Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2023 untuk 4 Pemda sebesar Rp35.672.724.290,00. Pemotongan dilakukan pada penyaluran DAU bulan Agustus s.d. Desember 2023.
6. KMK 20/KM.7/2023 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil Atas Pemerintah Daerah Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 untuk 5 Pemda yaitu Kota Banda Aceh, Kab. Subulussalam, Kab. Rokan Hilir, Kab. Kotabaru, dan Kab. Fak-Fak dengan total pemotongan sebesar Rp43.425.957.313,00. Pemotongan dilaksanakan pada penyaluran DAU bulan September 2023.
7. KMK 22/KM.7/2023 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok atas Pinjaman Daerah Kabupaten Gorontalo Fasilitas I dan Kabupaten Gorontalo Fasilitas Ii Tahun 2020 untuk Periode Penyaluran Bulan September sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023 untuk Kabupaten Gorontalo sebesar Rp31.808.364.755,00. Pemotongan dilakukan untuk penyaluran DAU bulan September s.d. Desember 2023.
8. KMK 29/KM.7/2023 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 Atas Daerah yang Masih Terdapat Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2022 untuk 456 Daerah sebesar Rp85.023.203.616,00. Pemotongan dilakukan atas penyaluran DAU bulan Oktober 2023.
9. KMK 35/KM.7/2023 tentang Perubahan Kedua atas KMK 29/KM.7/2023 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 Atas Daerah yang Masih Terdapat Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2022. Dalam KMK ini terdapat perubahan nilai pemotongan DAU bulan Oktober 2023 untuk 7 Daerah, yaitu Kab. Puncak, Kab. Sambas, Kab. Sumbawa, Kab. Rote Ndao, Kota Binjai, Kab. Boalemo, dan Kota Tanjung Pinang dengan total sebesar Rp404.299.957,00, sehingga besaran pemotongan DAU bulan Oktober menjadi Rp84.618.903.659,00.
10. KMK 30/KM.7/2023 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Fasilitas I, Provinsi Jawa Barat Fasilitas II, Provinsi Jawa Barat Fasilitas III, dan Provinsi Jawa Barat Fasilitas IV Tahun 2020 Untuk Periode Penyaluran Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023 sebesar Rp141.701.508.786,00. Pemotongan dilaksanakan saat penyaluran DAU bulan Oktober s.d. Desember 2023.

11. KMK 32/KM.7/2023 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga Atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Untuk Periode Penyaluran Bulan November Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2023 sebesar Rp17.953.805.954,00. Pemotongan dilaksanakan pada penyaluran DAU Prov. Nusa Tenggara Barat Bulan November dan Desember 2023.
12. KMK 37/KM.7/2023 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Untuk Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Untuk Periode Penyaluran Bulan Desember Tahun 2023 sebesar Rp399.759.478,00. Pemotongan dilakukan pada penyaluran DAU Kota Bogor Bulan Desember 2023.

Realisasi DAU murni *Block grant* tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp20.444.156.149.357 atau turun sebesar 23,56 persen dibandingkan realisasi DAU tahun 2022 sebesar Rp378.000.000.000.000. Namun, pada tahun 2023 terdapat kebijakan baru yaitu DAU yang ditentukan penggunaannya dengan pagu anggaran sebesar Rp109.232.161.283.000 dengan realisasi Rp 109.099.750.820.542 atau sekitar 99,88 persen dari pagu anggarannya. Adapun masing-masing realisasi DAU yang ditentukan penggunannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Uraian Akun	Tahun 2023		%	Realisasi Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
	Anggaran	Realisasi			
Dana Alokasi Umum	**398.162.039.057.000**	398.029.628.594.542	**99,97%**	**378.000.000.000.000**	5,30
Dana Alokasi Umum Tidak ditentukan penggunaannya	**288.929.877.774.000**	288.929.877.774.000	**99,97%**	**378.000.000.000.000**	(23,56)
Belanja Dana Alokasi Umum	288.929.877.774.000	288.929.877.774.000	99,97%	378.000.000.000.000	(23,56)
Dana Alokasi Umum Ditentukan Penggunaannya	**109.232.161.283.000**	**109.099.750.820.542**	**99,97%**	**-**	
Belanja Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK	25.741.997.004.000	25.741.997.004.000	**100,00%**	-	
Belanja Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan	1.669.979.718.000	1.644.028.375.953	**98,45%**	-	
Belanja Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan	40.062.746.791.000	39.993.776.407.340	99,97%	-	
Belanja Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan	26.031.470.651.000	26.023.518.505.877	99,97%	-	
Belanja Dana Alokasi Umum Pekerjaan Umum	15.725.967.119.000	15.696.430.527.372	99,97%	-	

B.2.2.2.3. Dana Alokasi Khusus

Realisasi keseluruhan Dana Alokasi Khusus sampai dengan tahun 2023 mencapai sebesar Rp181.357.561.783.241 atau telah mencapai 96,93 persen terhadap anggarannya sebesar Rp187.103.910.343.000. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp8.192.920.728.410 atau 4,73 persen dari realisasi periode yang sama tahun anggaran sebelumnya. Dana Alokasi Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus non Fisik, dan Hibah Kepada Daerah. Realisasi Dana Alokasi Khusus per-Daerah dapat dilihat di **Lampiran LRA LB10**. Rincian Realisasi penyaluran Dana Transfer Khusus sebagaimana disajikan dalam tabel realisasi Dana Transfer Khusus Tahun anggaran 2023 pada Tabel berikut ini:

URAIAN	Tahun 2023		%	Realisasi Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan
	PAGU	REALISASI			
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	**53.422.463.835.000**	**50.334.741.347.305**	**94,22%**	**54.783.954.054.112**	**(8,12)**
Dana Alokasi Khusus Penugasan	53.422.463.835.000	50.334.741.347.305	94,22%	12.085.486.657.682	316,49
Belanja Dana Alokasi Khusus Reguler	0	0	0,00%	42.698.467.396.430	(100,00)
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	**130.214.110.762.000**	**128.081.946.376.309**	**98,36%**	**118.380.687.000.719**	**8,19**
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	50.449.571.133.000	49.547.218.967.514	98,21%	46.547.785.535.686	6,44
Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	1.667.081.869.000	1.594.366.287.923	95,64%	1.193.073.260.050	33,64
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	1.423.098.558.000	1.166.575.891.867	81,97%	991.045.485.177	17,71
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.441.572.210.000	53.094.401.455.075	99,35%	51.345.762.364.395	3,41
Dana Bantuan Operasional Kesehatan	12.878.672.152.000	12.412.991.969.900	96,38%	9.653.384.267.000	28,59
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.239.300.000.000	3.230.739.603.000	99,74%	2.663.934.986.000	21,28
Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	65.827.750.000	62003157725	94,19%	55.658.502.955	11,40
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	250.000.000.000	249.210.260.000	99,68%	223.798.218.000	11,35
Dana Pelayanan Kepariwisataan	133.300.000.000	131.787.586.500	98,87%	127.814.750.000	3,11
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan-Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	4.119.098.130.000	4.086.064.854.769	99,20%	3.737.218.787.456	9,33
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	1.494.568.960.000	1.475.083.542.036	98,70%	996.671.271.000	48,00
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	169.975.000.000	169.975.000.000	100,00%	165.887.500.000	2,46
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	132.000.000.000	128.562.300.000	97,40%	114.052.500.000	12,72
Dana Fasilitasi Penanaman Modal	250.000.000.000	247.386.450.000	98,95%	221.756.002.000	11,56
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	300.045.000.000	292.704.050.000	97,55%	197.786.550.000	47,99
Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	200.000.000.000	192.875.000.000	96,44%	145.057.021.000	32,96
HIBAH KEPADA DAERAH	**3.467.335.746.000**	**2.940.874.059.627**	**84,82%**	-	**100,00**
Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	2.313.544.650.000	1.977.982.930.618	85,50%	-	100,00
Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	164.726.096.000	143.405.713.248	87,06%	-	100,00
Hibah kepada daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan	989.065.000.000	819.485.415.761	82,85%	-	100,00

B.2.2.2.3.1 Dana Alokasi Khusus Fisik

Realisasi Transfer DAK Fisik pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp50.334.741.347.305 dan Rp54.783.954.054.112. Realisasi Transfer DAK Fisik tahun 2023 mencapai 94,22 persen dari anggaran transfer DAK Fisik sebesar Rp53.422.463.835.000. Realisasi penyaluran dana transfer DAK Fisik (bruto) Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp4.449.212.706.807 atau sebesar 8,12 persen dari periode Tahun 2022. Realisasi transfer DAK Fisik Tahun 2023 sebesar Rp50.334.741.347.305 seluruhnya disalurkan untuk DAK Fisik Penugasan. Adapun Bidang pada penyaluran Transfer DAK Fisik pada tahun anggaran 2023 per bidang sebagaimana tabel berikut ini.

BIDANG	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan %
	PAGU	Realisasi	%		
Air Minum	1.951.800.000.000	1.830.797.280.205	93,80	2.729.056.087.133	32,91
Industri Kecil dan Menengah	450.000.000.000	398.053.146.865	88,46	644.875.402.963	38,27
Infrastruktur Energi Terbarukan	88.000.000.000	87.215.780.515	99,11	0	100
Irigasi	1.688.944.553.000	1.507.510.515.757	89,26	1.271.036.217.158	(18,60)
Jalan	12.617.759.056.000	12.162.540.594.920	96,39	11.364.072.136.133	(7,03)
Kehutanan	32.000.000.000	29.220.059.595	91,31	313.126.608.906	90,67
Kelautan dan Perikanan	1.234.900.000.000	1.120.669.462.214	90,75	1.006.193.999.677	(11,38)
Kesehatan dan KB	13.400.000.000.000	12.376.619.051.710	92,36	12.867.484.274.112	3,81
Lingkungan Hidup	154.956.000.000	146.853.293.816	94,77	308.501.320.344	52,40
Pariwisata	450.000.000.000	349.057.002.092	77,57	311.634.178.252	(12,01)
Pendidikan	15.820.300.000.000	15.095.592.187.700	95,42	17.689.625.337.477	14,66
Perdagangan	150.000.000.000	149.622.533.098	99,75	148.565.499.439	(0,71)
Pertanian	2.363.652.413.000	2.174.853.051.003	92,01	1.994.413.435.844	(9,05)
Perumahan dan Permukiman	160.651.813.000	137.324.360.524	85,48	666.676.807.587	79,40
Sanitasi	1.569.500.000.000	1.550.016.807.373	98,76	1.953.416.589.241	20,65
Transportasi Perairan	440.000.000.000	401.797.186.095	91,32	463.161.480.375	13,25
Transportasi Perdesaan	750.000.000.000	722.014.296.662	96,27	938.895.447.094	23,10
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	100.000.000.000	94.984.737.161	94,98	113.219.232.377	16,11
TOTAL	53.422.463.835.000	**50.334.741.347.305**	**94,22**	**54.783.954.054.112**	**8,12**

B.2.2.2.3.2 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Realisasi DAK Nonfisik tahun 2023 mencapai Rp128.081.946.376.309. Realisasi DAK Nonfisik sampai tahun 2023 mencapai 98,36 persen dari anggaran DAK Nonfisik Tahun 2023 sebesar Rp130.214.110.762.000.

Realisasi DAK Non Fisik tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 9.701.259.375.590 atau 8,19 persen dari realisasi DAK Non Fisik pada periode yang sama Tahun 2022 sebesar Rp118.380.687.000.719. Laporan Realisasi Anggaran DAK Nonfisik Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

URAIAN	Tahun 2023		%	Realisasi Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan %
	PAGU	REALISASI			
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	**130.214.110.762.000**	**128.081.946.376.309**	**98,36%**	**118.380.687.000.719**	**8,19**
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	50.449.571.133.000	49.547.218.967.514	98,21%	46.547.785.535.686	6,44
Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	1.667.081.869.000	1.594.366.287.923	95,64%	1.193.073.260.050	33,64
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	1.423.098.558.000	1.166.575.891.867	81,97%	991.045.485.177	17,71
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.441.572.210.000	53.094.401.455.075	99,35%	51.345.762.364.395	3,41
Dana Bantuan Operasional Kesehatan	12.878.672.152.000	12.412.991.969.900	96,38%	9.653.384.267.000	28,59
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.239.300.000.000	3.230.739.603.000	99,74%	2.663.934.986.000	21,28
Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	65.827.750.000	62.003.157.725	94,19%	55.658.502.955	11,40
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	250.000.000.000	249.210.260.000	99,68%	223.798.218.000	11,35
Dana Pelayanan Kepariwisataan	133.300.000.000	131.787.586.500	98,87%	127.814.750.000	3,11
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan-Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	4.119.098.130.000	4.086.064.854.769	99,20%	3.737.218.787.456	9,33
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	1.494.568.960.000	1.475.083.542.036	98,70%	996.671.271.000	48,00
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	169.975.000.000	169.975.000.000	100,00%	165.887.500.000	2,46
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	132.000.000.000	128.562.300.000	97,40%	114.052.500.000	12,72
Dana Fasilitasi Penanaman Modal	250.000.000.000	247.386.450.000	98,95%	221.756.002.000	11,56
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	300.045.000.000	292.704.050.000	97,55%	197.786.550.000	47,99
Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	200.000.000.000	192.875.000.000	96,44%	145.057.021.000	32,96
Jumlah	130.214.110.762.000	128.081.946.376.309	98,36%	118.380.687.000.719	8,19

Realisasi penyaluran DAK Non Fisik dilakukan berdasarkan nota dinas rekomendasi untuk setiap tahapan sesuai dengan masing-masing jenis DAK Non Fisik.

B.2.2.2.3.3 Hibah Kepada Daerah

Realisasi Hibah Kepada Daerah sebagaimana tercantum dalam LRA Tahun 2023 mencapai Rp2.940.874.059.627. Realisasi hibah kepada daerah tahun 2023 mencapai 84,82 persen dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp3.467.335.746.000. Transfer Hibah ke Daerah disalurkan oleh KPPN selaku KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus mulai tahun 2023 dan hanya disalurkan melalui KPPN Jakarta I. Rincian Realisasi Hibah Kepada Daerah TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

URAIAN	Pagu	Realisasi	%
Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	2.313.544.650.000	1.977.982.930.618	85,50
Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	164.726.096.000	143.405.713.248	87,06
Hibah kepada daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan	989.065.000.000	819.485.415.761	82,85
Jumlah Hibah Kepada Daerah	3.467.335.746.000	2.940.874.059.627	84,82

B.2.2.2.4 Dana Otonomi Khusus

Realisasi Dana Otsus pada Tahun 2023 sejumlah Rp17.241.263.570.000 atau 100,00 persen dari pagu anggaran sebesar Rp17.241.263.570.000. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp20.436.263.570.000, mengalami penurunan sebesar Rp3.195.000.000.000 atau sebesar 15,3 persen. Rincian realisasi per jenis Dana Otsus TA 2023 dibandingkan dengan TA 2022 tersaji pada tabel berikut.

	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	Persen
Belanja Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	3.960.000.000.000	7.560.000.000.000	(3.600.000.000.000)	(47,62)
Belanja Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	0	5.783.400.000.000	(5.783.400.000.000)	(100,00)
Belanja Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	0	2.721.600.000.000	(2.721.600.000.000)	(100,00)
Belanja Dana Tambahan Infrastruktur Papua	734.634.275.000	2.404.194.963.000	(1.669.560.688.000)	(69,44)
Belanja Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	803.970.737.000	1.967.068.607.000	(1.163.097.870.000)	(59,13)
Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum Provinsi Papua	697.537.158.000		697.537.158.000	100,00
Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum Provinsi Papua Barat	665.426.268.000	0	665.426.268.000	100,00
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Barat Daya	628.971.170.000	0	628.971.170.000	100,00
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Pegunungan	784.905.913.000	0	784.905.913.000	100,00
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Selatan	448.666.078.000	0	448.666.078.000	100,00
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Tengah	734.493.413.000	0	734.493.413.000	100,00
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua	871.921.448.000	0	871.921.448.000	100,00
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Barat	831.782.835.000	0	831.782.835.000	100,00
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Barat Daya	786.213.963.000	0	786.213.963.000	100,00
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Pegunungan	981.132.390.000	0	981.132.390.000	100,00
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Selatan	560.832.598.000	0	560.832.598.000	100,00
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Tengah	918.116.766.000	0	918.116.766.000	100,00
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat Daya	759.925.539.000	0	759.925.539.000	100,00
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Pegunungan	826.649.561.000	0	826.649.561.000	100,00
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Selatan	472.527.485.000	0	472.527.485.000	100,00
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Tengah	773.555.973.000	0	773.555.973.000	100,00
Jumlah	17.241.263.570.000	20.436.263.570.000	(3.195.000.000.000)	(15,63)

B.2.2.2.5. Dana Keistimewaan DI Yogyakarta

Realisasi Transfer DK-DIY Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.372.725.809.224 yaitu 96,67 persen dari pagu anggarannya. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 yang berjumlah Rp1.320.000.000.000, jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp52.725.809.224 atau 3,99 persen. Transfer Dana Keistimewaan DIY Tahun 2023 adalah realisasi Transfer Dana Keistimewaan sampai dengan Tahap III sesuai PMK 16/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogya dengan rincian sebagai berikut

Uraian	Tahun 2023		Realisasi 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
	Pagu	Realisasi		
Tahap I	1.420.000.000.000	165.725.809.224	198.000.000.000	(2,45)
Tahap II		923.000.000.000	858.000.000.000	4,92
Tahap III		284.000.000.000	264.000.000.000	1,52
Jumlah	1.420.000.000.000	1.372.725.809.224	1.320.000.000.000	3,99

B.2.2.2.6. Dana Desa

Realisasi Transfer Dana Desa pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp69.856.768.617.317 dan Rp67.906.138.390.431. Realisasi Transfer Dana Desa Tahun 2023 adalah sebesar 99,80 persen dari anggaran transfer Dana Desa sebesar Rp70.000.000.000.000 merupakan penggabungan realisasi transfer Dana Desa Tingkat UAKPA BUN. Realisasi transfer Dana Desa pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.950.630.226.886 atau sebesar 2,87 persen dari periode Tahun 2022. Realisasi Dana Desa s.d. 31 Desember Tahun 2023.

Rincian realisasi Dana Desa Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Uraian	Tahun 2023		
	Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
Desa Reguler			
Dana Desa Tahap I		18.405.784.665.000	26,29
Dana Desa Tahap II		18.368.781.213.551	26,24
Dana Desa Tahap III		15.030.973.528.614	21,47
Desa Mandiri	70.000.000.000.000		
Dana Desa Tahap I		2.974.221.230.850	4,25
Dana Desa Tahap II		2.641.674.965.302	3,77
BLT Desa		10.436.403.600.000	14,91
Realokasi		1.998.929.414.000	2,86
Total Dana Desa	70.000.000.000.000	**69.856.768.617.317**	99,80

B.2.2.2.7. Insentif Fiskal

Pada tahun 2023 penyajian realisasi anggaran Insentif Fiskal merupakan perubahan nomenklatur Dana Insentif Daerah yang disajikan pada tahun 2022. Realisasi Insentif Fiskal tahun 2023 sebesar Rp7.906.031.813.500 atau 98,83 persen dari pagu anggarannya sebesar Rp8.000.000.000.000. Jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp6.993.672.774.000, realisasi Transfer Insentif Fiskal TA 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp912.359.039.500 atau 13,05 persen. Realisasi Insentif Fiskal dengan jumlah tersebut merupakan Penyaluran Insentif Fiskal Tahap I dan II kepada seluruh daerah yang menerima alokasi pada TA 2023. Transfer Dana Insentif Fiskal Tahun 2023 adalah realisasi Transfer Dana Insentif Fiskal sampai dengan Tahap I dan II sesuai PMK 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Sistem Insentif Fiskal

B.2.3. Defisit Anggaran

Berdasarkan Realisasi Pendapatan BUN dan Hibah dan Realisasi Belanja BUN Tahun 2023, maka Defisit Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp1.696.176.969.504.168 yang berarti 96,55 persen dari yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp1.756.844.996.569.000 dengan perhitungan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
Pendapatan BUN dan Hibah	272.810.959.159.689	238.341.910.771.353	14,46
Belanja BUN	1.968.987.928.663.857	2.011.588.067.001.453	(2,12)
Defisit Anggaran	**(1.696.176.969.504.168)**	**(1.773.246.156.230.100)**	(4,35)

B.2.4. Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan Tahun 2023 adalah sebesar Rp356.663.747.714.521 atau 74,32 persen dari anggaran sebesar Rp479.927.462.971.000. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp590.978.140.090.153, realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp234.314.392.375.632 atau turun 39,65 persen.

Pembiayaan terdiri dari (i) Pembiayaan Dalam Negeri, dan (ii) Pembiayaan Luar Negeri. Realisasi Pembiayaan yang akan diuraikan di bawah ini adalah realisasi Pembiayaan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).

B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri selama Tahun 2023 adalah sebesar Rp277.369.700.819.453 atau 55,66 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2023 (Perpres 75 Tahun 2023) sebesar Rp498.362.712.804.000. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp563.782.350.533.612, realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp286.412.649.714.159 atau turun 50,80 persen. Pembiayaan Dalam Negeri meliputi Penerimaan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian pinjaman, Penerimaan Hasil Privatisasi dan Penjualan Aset Program Retrukturisasi, Surat Berharga Negara, Pinjaman Dalam Negeri, PMN/Dana Investasi Pemerintah, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, dan Pengeluaran Kewajiban Penjaminan.

B.2.4.1.1. Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL)

Pada Tahun 2023 realisasi penerimaan pembiayaan yang berasal penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp35.000.000.000.000 atau 15,43 persen dari yang dianggarkan dalam APBN 2023 (Perpres 75 Tahun 2023) sebesar Rp226.880.171.913.000. Penggunaan SAL tersebut merupakan Penggunaan dana SAL sebagai pembiayaan APBN TA 2023 sesuai dengan nota dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara nomor ND-2223/PB.3/2023 tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp35.000.000.000.000.

B.2.4.1.2. Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Pembangunan Hutan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Pembangunan Hutan Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.225.200.000.000 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2023 (Perpres 75 Tahun 2023) sebesar Rp2.225.200.000.000. Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Pembangunan Hutan sebesar Rp2.225.200.000.000 yang disimpan pada Deposito Rekening Pembangunan Hutan (Aset Lainnya – Dana Dibatasi Penggunaannya).

Pemindahbukuan dana tersebut dilakukan berdasarkan permintaan Direktur Sistem Manajemen Investasi nomor ND-1338/PB.4/2023 tanggal 18 Desember dan Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara nomor ND-2152/PB.3/2023 tanggal 19 Desember 2023 sebesar Rp2.225.200.000.000.

B.2.4.1.3. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman

Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian pinjaman Tahun 2023 adalah sebesar Rp6.374.398.495.969 atau 100,38 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2023 (Perpres 75 Tahun 2023) sebesar Rp6.349.993.814.000. Realisasi penerimaan cicilan pemberian pinjaman mengalami kenaikan sebesar Rp2.422.241.398.599 atau 61,29 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp3.952.157.097.370. Rincian Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian pinjaman dan Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagaimana berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri	2.041.258.121.405	29.858.499.715	6.736,44
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri	1.120.000.000	2.922.593.380	-61,68
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman dalam Negeri kepada BUMD	198.181.821	163.631.368	21,11
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMN	2.030.566.500.738	15.954.640.456	12.627,12
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman dalam Negeri Kepada Non Pemerintah	9.373.438.846	10.817.634.511	-13,35
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri	4.333.140.374.564	3.922.298.597.655	10,47
Penerimaan Cicilan Pengembalian PPLN kepada Daerah	77.691.349.491	77.924.682.822	-0,3
Penerimaan Cicilan Pengembalian PPLN kepada BUMN	4.233.335.861.730	3.820.849.065.110	10,8
Penerimaan Cicilan Pengembalian PPLN kepada Non Pemerintah	22.113.163.343	23.524.849.723	-6
Jumlah	**6.374.398.495.969**	**3.952.157.097.370**	**61,29**

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 berasal dari pembayaran Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman oleh debitur melalui Rekening Dana Investasi (RDI), Rekening Pembangunan Daerah (RPD), dan Rekening Pemerintah Lainnya (RPL). Nilai pembayaran terbesar dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) dengan nilai pembayaran mencapai Rp2.876.690.757.054 atau 72,59 persen dari jumlah penerimaan pembiayaan di luar Penerimaan PMN Non Tunai PT RNI dan PT Len Industri. Berikut merupakan 10 (sepuluh) debitur dengan nilai pembayaran Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman terbesar sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

No.	Nama Debitur	Nilai (dalam rupiah)
1.	PT. PLN	2.876.690.757.054
2.	PT.SMI	371.601.749.291
3.	PT PGN	249.481.434.785
4.	PERTAMINA	240.653.455.953
5.	PT. TELKOM	240.653.455.953
6.	PEMPROV DKI	33.629.623.430
7.	PT. BANK MANDIRI	16.310.512.574
8.	PEMKAB ACEH TIMUR	10.571.402.112
9.	PT. KERTAS LECES	7.448.214.584
10.	Perusahaan Inti Rakyat	6.278.516.130

B.2.4.1.4. Penerimaan Hasil Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Penerimaan Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi yang berasal dari penerimaan pengelolaan aset eks BLBI sebesar Rp1.097.737.606.166 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp430.561.340.654 atau 64,53 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp667.176.265.512. Penerimaan Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi yang berasal dari penerimaan pengelolaan aset eks BLBI berasal dari Pengelolaan atas Aset Program Restrukturisasi Perbankan yang dilakukan DJKN melalui mekanisme pengurusan aset kredit oleh Panitia Urusan Piutang Negara, penjualan secara lelang aset properti, penebusan aset properti, penjualan secara lelang aset inventaris, pengelolaan surat berharga dan saham, dan pengelolaan aset yang diserahkelolakan kepada PT PPA (Persero) di mana yang dicatat sebagai penerimaan pembiayaan adalah yang telah tercatat dalam aplikasi Treasury Billing System (TBS), Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI), SPAN, serta modul Penerimaan setoran ke RKUN (FIRA). Rincian Realisasi Penjualan Aset Program Restrukturisasi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Penerimaan hasil penjualan / penyelesaian aset eks BPPN	1.030.646.856.018	643.617.367.500	60,13
2	Penerimaan hasil Penjualan / Penyelesaian aset eks BDL	67.090.750.148	23.558.898.012	184,78
Total		1.097.737.606.166	667.176.265.512	64,53

a. Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks BPPN

Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks BPPN terdiri dari realisasi pengelolaan aset eks BPPN, realisasi pengelolaan aset eks Kelolaan PT PPA, dan realisasi pengelolaan aset eks BPPN aset yang diserahkelolakan kepada PT PPA. Penerimaan hasil pengelolaan aset eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) serta hasil pengelolaan aset yang diserahkelolakan kepada PT PPA (Persero) berasal dari pembayaran dan/atau pelunasan dalam rangka penyelesaian/pengurusan piutang negara, penjualan melalui lelang aset properti dan/atau aset inventaris, penebusan aset properti, pencairan aset nostro, pelepasan aset saham/surat berharga dan penjualan melalui lelang barang jaminan obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) yang telah disetorkan oleh unit-unit terkait ke Rekening Kas Umum Negara Dalam Rupiah 502.000000.980 MAK 711312 baik secara langsung maupun lewat modul SIMPONI dan TBS. Berdasarkan data yang berasal dari data modul FIRA pada OMSPAN dan data modul SIMPONI selama Periode Tahun 2023, DJKN c.q. Direktorat PKNSI selaku unit pengelola aset eks BPPN dan eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) telah membukukan penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks BPPN yang telah diterima di Rekening Kas Umum Negara (RKUN) sebesar Rp1.030.646.856.018. Adapun rincian penerimaan tersebut disajikan dalam table berikut:

PERIODE	AKUN	URAIAN	DJKN
			NOMINAL RUPIAH
[1]	[2]	[3]	[4]
Januari	711312	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	32.129.890.613
Februari	711312	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	46.775.921.912
Maret	711312	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	45.823.771.495
April	711312	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	34.272.785.400
Mei	711312	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	15.917.824.699
Juni	711312	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	18.845.965.675
Juli	711312	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	14.241.444.999
Agustus	711312	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	30.540.714.520
September	711312	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	130.205.614.171
Oktober	711312	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	29.362.834.346
November	711312	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	13.112.560.954
Desember	711312	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	619.417.527.234
TOTAL			1.030.646.856.018

b. Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks BDL

Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) diperoleh dari hasil pembayaran/pelunasan aset kredit yang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), penjualan barang jaminan diambil alih/aset properti, pendapatan bunga dari obligasi, dan deviden dari saham yang telah disetorkan oleh unit-unit terkait ke Rekening Kas Umum Negara Dalam Rupiah 502.000000.980 Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 711313

Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL, baik secara langsung dengan monitoring OM SPAN maupun lewat Treasury Billing System (TBS). Berdasarkan data yang berasal dari Modul MPN G3 NOW selama Tahun 2023, telah tercatat setoran per MAP 711313 sebesar Rp67.090.750.148. Direktorat PKNSI selaku unit pengelola aset eks BDL telah melakukan analisa dan pengakuan terhadap penerimaan pada MAP 711313 tersebut dan berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku Anggota PUPN Cabang maka terdapat setoran yang harus dikoreksi dari MAP 711312 menjadi MAP 711313 dan terdapat beberapa transaksi yang dibukukan pada TBS telah dilakukan perbaikan transaksi kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk reklasifikasi akun (reklas) dan/atau pemecahan transaksi (split transaction). Berdasarkan analisa dan menindaklanjuti hasil rekonsiliasi tersebut maka hasil pengelolaan aset yang menjadi hak pemerintah diperhitungkan sebagai pengurang piutang Pemerintah pada BDL Tahun 2023 sebesar Rp67.090.750.148. Rincian penerimaan Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL disajikan dalam tabel berikut:

PERIODE	AKUN	URAIAN	NILAI
[1]	[2]	[3]	[4]
JANUARI	711313	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	1.455.898.385
FEBRUARI	711313	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	1.924.217.308
MARET	711313	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	2.572.782.206
APRIL	711313	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	3.358.059.231
MEI	711313	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	4.158.734.791
JUNI	711313	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	3.101.187.165
JULI	711313	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	4.972.726.869
AGUSTUS	711313	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	9.208.856.474
SEPTEMBER	711313	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	4.030.327.106
OKTOBER	711313	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	6.623.944.798
NOVEMBER	711313	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	17.234.933.981
DESEMBER	711313	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	8.449.081.834
TOTAL			**67.090.750.148**

B.2.4.1.5. Surat Berharga Negara (Neto)

Realisasi Pembiayaan dari SBN Tahun 2023 adalah sebesar Rp308.193.788.405.962 atau 70,39 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2023 (Perpres 75 Tahun 2023) sebesar Rp437.834.050.997.000. Penurunan ini sebagai akibat dari kebijakan umum dan strategi pengelolaan utang Pemerintah yang senantiasa mengupayakan kemandirian pembiayaan. Selain hal tersebut, penurunan ini juga dikarenakan nilai realisasi defisit APBN yang lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Selain hal tersebut, penurunan ini juga dikarenakan nilai realisasi defisit APBN yang lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp350.623.117.015.414 atau 53,22 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp658.816.905.421.376. Realisasi SBN, terdiri dari penerimaan penjualan SBN dan pengeluaran untuk pembayaran/pelunasan SBN. Realisasi Penerimaan SBN Tahun 2023 sebesar Rp848.108.055.742.428 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.097.456.235.269.290, sedangkan Realisasi

Pengeluaran SBN Tahun 2023 sebesar Rp539.914.267.336.466 dan Tahun 2022 sebesar Rp438.639.329.847.919.

Rincian Realisasi SBN Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
Penerimaan Penjualan Surat Berharga Negara	848.108.055.742.428	1.097.456.235.269.295	(22,72)
Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara	34.542.000.000.000	68.605.000.000.000	(49,65)
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara	445.320.497.000.000	435.469.216.000.000	2,26
Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara	5.605.322.706.060	6.058.451.006.441	(7,48)
Penerimaan penerbitan/penjualan Obligasi Negara - PC PEN *Public Goods*	0	207.423.350.000.000	(100,00)
Penerbitan/Penjualan SBSN Jangka Panjang	221.619.255.704.658	190.396.410.602.999	16,40
Penerimaan Imbalan dibayar dimuka SBSN Jk. Panjang	2.469.080.982.310	2.129.747.492.160	15,93
Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	0	16.576.650.000.000	(100,00)
Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Syariah	13.830.000.000.000	17.223.000.000.000	(19,70)
Penerbitan SBSN dlm rangka Pembiayaan Proyek-PBS	34.348.433.295.342	29.536.460.397.001	16,29
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara-Valas	58.971.351.694.000	74.526.126.155.000	(20,87)
Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara-Valuta Asing	4.114.360.058	6.373.615.694	(35,45)
Penerbitan/Penjualan SBSN Valas Jangka Panjang	31.398.000.000.000	49.505.450.000.000	(36,58)
Pengeluaran Pembayaran/Pelunasan Surat Berharga Negara	539.914.267.336.466	438.639.329.847.919	23,09
Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara	54.005.000.000.000	58.655.000.000.000	(7,93)
Pelunasan Obligasi Negara	159.532.411.170.979	136.775.733.563.248	16,64
Pelunasan Obligasi Negara melalui Pembelian Kembali	32.780.366.000.000	24.061.000.000.000	36,24
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara	5.993.063.722.946	4.953.040.043.397	21,00
Pelunasan SBSN Jangka Panjang	174.659.931.000.000	95.679.108.000.000	82,55
Pembayaran Imbalan dibayar dimuka SBSN - Jk Panjang	2.582.477.419.452	2.016.085.525.018	28,09
Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara Syariah	11.983.000.000.000	20.450.000.000.000	(41,40)
Pelunasan Obligasi Negara - Valas	79.319.816.212.000	52.955.187.227.000	49,79
Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Valas - melalui Pembelian Kembali	0	11.579.647.985.000	(100,00)
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara – Valas	8.201.811.089	30.227.504.256	(72,87)
Pelunasan SBSN Valas - Jangka Panjang	19.050.000.000.000	31.484.300.000.000	(39,49)
Jumlah SBN Netto	308.193.788.405.962	658.816.905.421.376	(53,22)

B.2.4.1.6. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

Realisasi Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri Neto Tahun 2023 adalah sebesar Rp14.558.368.405.525 atau 1942,54 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2023 (Perpres 75 Tahun 2023) sebesar Rp749.450.378.000 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp6.357.086.051.284 atau 77,51 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp8.201.282.354.241. Adanya kenaikan realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri disebabkan terjadinya akselerasi dalam pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana awal yang bertujuan untuk mempercepat penyelesaian kegiatan.

Realisasi Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri (Neto) tersebut terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp17.504.129.527.679 dan Pembayaran Cicilan Pokok PDN sebesar Rp2.945.761.122.154. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) tahun 2023

mencapai 502,76% dari anggaran karena terdapat percepatan Penerimaan Pembiayaan PDN yang dilakukan sesuai dengan progres pelaksanaan kegiatan. Pada saat perencanaan anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2022, usulan anggaran Penerimaan Pembiayaan PDN relatif kecil mengingat tedapat kegiatan-kegiatan yang masih dalam tahap perencanaan kegiatan maupun dalam tahap proses pengadaan PDN sehingga masih terdapat kemungkinan dilaksanakan atau tidaknya kegiatan tersebut. Pada saat tahun berjalan tahun 2023, terdapat proses pengadaan Penerimaan Pembiayaan PDN baru sebagai tindak lanjut DKPPDN yang diterbitkan Bappenas dengan jumlah relatif banyak yang pada akhirnya mempengaruhi peningkatan realisasi Penerimaan Pembiayaan PDN tahun 2023. Rincian pemberi Pinjaman Dalam Negeri baik yang berasal dari BUMN dan Perusahaan Daerah, termuat dalam tabel berikut:

Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN dan Perusahaan Daerah	Tahun 2023	Tahun 2022
Bank DKI	1.016.169.511.081	
PT. Bank Mandiri Tbk	11.027.048.333.513	7.542.277.411.856
PT. BNI (Persero)	2.301.682.518.960	2.583.250.692.034
PT. BTN (Persero)	3.159.229.164.125	
Jumlah	17.504.129.527.679	10.125.528.103.890

Pada Tahun 2023, penarikan pinjaman berasal dari BUMN, yaitu Bank Mandiri, PT. BNI dan PT. BTN dan Perusahaan Daerah yaitu Bank DKI. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri digunakan untuk membiayai kegiatan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI dan kegiatan pengadaan Alat Material Khusus (Almatsus) Polri serta beberapa kegiatan pada BIN

B.2.4.1.7. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah (Neto)

Realisasi Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Dana Investasi Pemerintah Tahun 2023 adalah sebesar minus Rp69.897.795.440.654 atau 44,82 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2023 (Perpres 75 Tahun 2023) sebesar Rp155.955.303.621.000. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp16.826.512.164.233 atau 19,40 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022.

Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Dana Investasi Pemerintah Tahun 2023 sebesar Rp69.897.795.440.654 terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp26.800.909.690.612
2. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp96.698.705.131.266

Rincian penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan bila dibandingkan dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan (%)
Penerimaan	**26.800.909.690.612**	**27.081.703.613.522**	(1,04)
Penerimaan pembiayaan dari UAP DJPK	2.944.155.651.898	2.311.496.745.459	27,37
Penerimaan Pembiayaan pada UAKPA KBUMN	5.285.019.139.000	8.701.143.500.000	(39,26)
Penerimaan pembiayaan atas pengesahan belanja modal K/L pada BLU LMAN	18.207.083.934.327	16.047.063.368.063	13,46
Penerimaan Investasi dari UAKPA Set BPJT	359.653.415.387	22.000.000.000	1534,79
Penerimaan Pembiayaan dari UAKPA BLU BPDLH (Mangrove)	4.997.550.000	-	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	**(96.698.705.131.266)**	**(113.806.011.218.409)**	(15,03)
Investasi Klaster Infrastruktur	(75.318.000.000.000)	(97.118.999.942.400)	(22,45)
Investasi Klaster Pangan dan Lingkungan Hidup	(5.589.910.241.052)	-	100,00
Investasi Klaster Perlindungan Masyarakat	(4.300.000.000.000)	(3.000.000.000.000)	43,33
Investasi Klaster Kerja Sama Internasional	(3.559.632.528.929)	(2.005.867.829.073)	77,46
Investasi Pemerintah Lainnya	(6.883.643.222.285)	(11.681.143.446.936)	(41,07)
Investasi Pemerintah	(1.047.519.139.000)	-	100,00
Jumlah	**(69.897.795.440.654)**	**(86.724.307.604.887)**	**(19,40)**

1. Penerimaan Pembiayaan

Sampai dengan 31 Desember 2023 realisasi penerimaan pembiayaan yang bersumber dari PMN/Dana Investasi Pemerintah sebesar Rp26.800.909.690.612. Penerimaan ini berasal dari UAP DJPK, UAKPA Set BPJT, UAKPA BLU LMAN, UAKPA Kementerian BUMN, dan UAKPA BLU BPDLH dengan rincian sebagai berikut:

a. UAP DJPK

Realisasi penerimaan pembiayaan yang berasal dari UAP DJPK Tahun 2023 sebesar Rp2.944.155.651.898 terdiri dari pengembalian pokok pinjaman melalui mekanisme pemotongan DAU bulan Januari-Desember 2023 sebesar Rp2.877.104.352.833 dan Pengembalian Dana Pengelolaan Pinjaman PEN Daerah dari PT SMI sebesar Rp67.051.299.065.

b. UAKPA KBUMN

Realisasi Penerimaan pembiayaan yang berasal dari UAKPA Kementerian BUMN adalah sebesar Rp5.285.019.139.000 berasal dari:

1) Pengembalian ke Kas Negara atas Dana PMN PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar Rp3.000.000.000.000;
2) Pengembalian ke Kas Negara atas Dana IP PEN PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebesar Rp800.000.000.000; dan
3) Pengembalian ke Kas Negara atas Pokok Pinjaman IP PEN PT Kereta Api (Persero) periode April 2023 dan Oktober 2023 masing-masing sebesar Rp218.750.000.000 dan Rp218.750.000.000
4) Pemindahbukuan IP PEN PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar Rp1.047.519.139.000

c. UAKPA BLU LMAN

Pos Penerimaan pembiayaan pada LRA UAKPA BLU LMAN menyajikan total pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah terbit SP2D pengesahan belanja modal. Nilai pengesahan belanja modal sama dengan total pengeluaran Dana Jangka Panjang oleh Entitas pada tahun 2023 sebelum dikurangi dengan retur Dana Jangka Panjang yang mengatribusi pengeluaran sebelum tahun 2023. Hingga 31 Desember 2023 telah direalisasikan penggunaan dana jangka panjang sebesar Rp18.207.083.934.327 dengan rincian sebagai berikut:

K/L	Jenis PSN	Nominal Pokok	Nominal *Cost of Funds*
PUPR	Air baku	22.945.264.480	-
	Bendungan	1.969.783.674.563	179.728.528
	Irigasi	31.769.023.220	-
	Ibu Kota Nusantara	1.426.137.165.291	-
	Jalan Tol	14.345.211.384.553	51.968.056.315
Perhubungan	Pelabuhan	975.468.666	-
	Perkeretaapian	358.114.168.711	-
Jumlah Per Kelompok Pembayaran		18.154.936.149.484	52.147.784.843
Total Pembayaran			18.207.083.934.327

d. UAKPA Set BPJT

Realisasi penerimaan pembiayaan yang berasal dari UAKPA Set BPJT tahun 2023 sebesar Rp359.653.415.387 merupakan angsuran pelunasan pinjaman pokok dana bergulir BLU BP Set BPJT dengan rincian sebagai berikut.

No	Debitur	Jumlah (Rp)
1	PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	2.000.000.000
2	PT Cimanggis Cibitung Tollways	5.211.184.908
3	PT Citra Waspphutowa	55.000.000.000
4	PT Jasamarga Kunciran Cengkareng	15.310.727.126
5	PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	35.514.573.047
6	PT Marga Trans Nusantara	96.814.882.416
7	PT Pejagan Pemalang Tol Road	40.000.000.000
8	PT Pemalang Batang Tol Road	4.000.000.000
9	PT Trans Jabar Tol	2.778.802.956
10	PT Trans Marga Jateng	17.023.244.934
11	PT Translingkar Kita Jaya	86.000.000.000
Jumlah		**359.653.415.387**

e. UAKPA BPDLH

Pada Tahun 2023 terdapat penerimaan pembiayaan atas pengesahan belanja BRGM atas pengelolaan dana rehabilitasi mangrove sebesar Rp4.997.550.000.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam APBN tahun anggaran 2023 pembiayaan investasi dilakukan antara lain dalam rangka: (1) mendukung percepatan Pembangunan infrastruktur; (2) meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan kebudayaan; (3) meningkatkan kerja sama Indonesia di dunia internasional; (4) mendukung perlindungan masyarakat; (5) mendukung ketahanan pangan dan menjaga lingkungan

hidup; serta (6) mendukung kebijakan strategis lainnya. Rincian realisasi untuk masing-masing KPA berdasarkan klaster dijelaskan dalam tabel berikut:

(*dalam miliar*)

Uraian	DIPA TA 2023			Realisasi Tahun 2023		
	Non PEN	PEN	Total	Non PEN	PEN	Total
Investasi Klaster Infrastruktur	**(85.318)**	**-**	**(85.318)**	**(75.318)**	**-**	**(75.318)**
KPA Satker KBUMN	(38.884)	-	(38.884)	(28.884)	-	(28.884)
KPA Satker DJKN	(1.530)	-	(1.530)	(1.530)	-	(1.530)
KPA Dit SMI DJPb	(19.480)	-	(19.480)	(19.480)	-	(19.480)
KPA Satker BLU LMAN	(25.424)	-	(25.424)	(25.424)	-	(25.424)
Investasi Klaster Perlindungan Masyarakat	**(4.300)**	**-**	**(4.300)**	**(4.300)**	**-**	**(4.300)**
KPA Satker BLU BPDLH	(4.300)	-	(4.300)	(4.300)	-	(4.300)
Investasi Klaster Pangan dan Lingkungan Hidup	**(5.589,9)**	**-**	**(5.589,9)**	**(5.589,9)**	**-**	**(5.589,9)**
KPA Satker Dit. SMI	(2.225,2)	-	(2.225,2)	(2.225,2)	-	(2.225,2)
KPA Satker BLU BPDLH	(800)	-	(800)	(800)	-	(800)
KPA Satker KBUMN	(2.564,7)	-	(2.564,7)	(2.564,7)	-	(2.564,7)
Investasi Klaster Kerja Sama Internasional	**(3.559,6)**	**-**	**(3.559,6)**	**(3.559,6)**	**-**	**(3.559,6)**
KPA Satker BLU LDKPI	(2.000)	-	(2.000)	(2.000)	-	(2.000)
KPA Satker BKF	(1.559,6)	-	(1.559,6)	(1.559,6)	-	(1.559,6)
Investasi Klaster Lainnya	**(6.883,6)**	**-**	**(6.883,7)**	**(6.883,7)**	**-**	**(6.883,7)**
KPA Satker KBUMN	(6.883,6)	-	(6.883,7)	(6.883,7)	-	(6.883,7)
Investasi Pemerintah	**-**	**(1.047,5)**	**(1.047,5)**	**-**	**(1.047,5)**	**(1.047,5)**
KPA Satker KBUMN	-	(1.047,5)	(1.047,5)	-	(1.047,5)	(1.047,5)
Total	**(105.615)**	**(1.047,5)**	**(106.698,7)**	**(95.651,2)**	**(1.047,5)**	**(96.698,7)**

a. Investasi Klaster Infrastruktur

Realisasi investasi klaster infrastruktur tahun 2023 sebesar Rp75.318.000.000.000 atau 88,28% dari alokasi yang telah dianggarkan dalam DIPA BUN BA 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah). Rincian realisasi klaster infrastruktur pada Tahun 2023 dijelaskan pada tabel berikut.

(*dalam miliar*)

Uraian	DIPA TA 2023			Realisasi Tahun 2023		
	Non PEN	PEN	Total	Non PEN	PEN	Total
Investasi Klaster Infrastruktur	**(85.318)**	**-**	**(85.318)**	**(75.318)**	**-**	**(75.318)**
KPA Satker KBUMN	**(38.884)**	**-**	**(38.884)**	**(28.884)**	**-**	**(28.884)**
PMN Kepada PT PLN	(10.000)	-	(10.000)	-	-	-
PMN Kepada PT HK	(28.884)	-	(28.884)	(28.884)	-	(28.884)
KPA Satker DJKN	**(1.530)**	**-**	**(1.530)**	**(1.530)**	**-**	**(1.530)**
PMN Kepada PT SMF	(1.530)	-	(1.530)	(1.530)	-	(1.530)
KPA Dit SMI DJPb	**(19.480)**	**-**	**(19.480)**	**(19.480)**	**-**	**(19.480)**
KPA Satker BLU LMAN	**(25.424)**	**-**	**(25.424)**	**(25.424)**	**-**	**(25.424)**

1) KPA Satker BUMN

Realisasi Pembiayaan Investasi Pemerintah klaster infrastruktur yang dianggarkan pada KPA Satker Kementerian BUMN sampai dengan Tahun 2023 adalah sebesar Rp28.884.000.000.000 atau 74,28% dari alokasi yang telah dianggarkan dalam DIPA, yaitu atas PMN kepada PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp28.884.000.000.000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023. Adapun, realisasi tambahan PMN kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) adalah sebesar Rp0 dikarenakan tidak terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Modal Negara.

2) KPA Satker DJKN

Realisasi investasi Pemerintah klaster infrastruktur yang dianggarkan kepada KPA Satker DJKN pada sampai dengan Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.530.000.000.000 atau 100% dari alokasi yang telah dianggarkan dalam DIPA, yaitu atas PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar (Rp1.530.000.000.000) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2023.

3) KPA Dit SMI DJPb

Realisasi investasi Pemerintah klaster infrastruktur yang dianggarkan kepada KPA Satker Direktorat SMI sampai dengan Tahun 2023 (unaudited) adalah sebesar (Rp19.480.000.000.000) atau 100% dari alokasi yang dianggarkan dalam DIPA. Realisasi tersebut merupakan nilai Investasi Non Permanen yang disalurkan kepada BP Tapera selaku Operator Investasi Pemerintah (OIP) dan menghasilkan output berupa pembiayaan kepada MBR)

4) KPA Satker BLU LMAN

Realisasi investasi Pemerintah kluster infrastruktur yang dianggarkan kepada KPA Satker BLU LMAN sampai dengan Tahun 2023 (unaudited) adalah sebesar (25.424.000.000.000) atau 100% dari alokasi yang dianggarkan dalam DIPA.

b. Investasi Klaster Perlindungan Masyarakat

Realisasi investasi klaster perlindungan masyarakat tahun 2023 sebesar Rp4.300.000.000.000 atau 100 persen dari alokasi yang dianggarkan dalam DIPA. Rincian alokasi dan realisasi klaster perlindungan masyarakat pada tahun 2023 dijelaskan pada tabel berikut.

(*dalam miliar*)

Uraian	DIPA TA 2023			Realisasi Tahun 2023		
	Non PEN	PEN	Total	Non PEN	PEN	Total
Investasi Klaster Perlindungan Masyarakat	**(4.300)**	**-**	**(4.300)**	**(4.300)**	**-**	**(4.300)**
KPA Satker BLU BPDLH	(4.300)	-	(4.300)	(4.300)	-	(4.300)

Alokasi investasi klaster perlindungan masyarakat merupakan alokasi kepada BLU BPDLH untuk dana bersama penanggulangan bencana dan bukan merupakan pembiayaan investasi dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 407/KMK.010/2021 tentang Penugasan Kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Untuk Melaksanakan Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana, BPDLH ditunjuk menjadi pengelola dana PFB.

Selanjutnya, berdasarkan KMK nomor 393/KMK.06/2022 tanggal 28 September 2022, Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana BLU BPDLH ditetapkan menjadi KPA BUN BA 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Dana Bersama Penanggulangan Bencana (PFB) dan dana DNS.

c. Investasi Klaster Pangan dan Lingkungan Hidup

Realisasi investasi klaster pangan dan lingkungan hidup tahun 2023 sebesar Rp5.589.910.241.052 atau 100 persen dari alokasi yang dianggarkan dalam DIPA. Rincian alokasi dan realisasi klaster perlindungan masyarakat pada tahun 2023 dijelaskan pada tabel berikut.

(dalam miliar Rp)

Uraian	DIPA TA 2023			Realisasi Tahun 2023		
	Non PEN	PEN	Total	Non PEN	PEN	Total
Investasi Klaster Pangan dan Lingkungan Hidup	**(5.589,9)**	**-**	**(5.589,9)**	**(5.589,9)**	**-**	**(5.589,9)**
KPA Satker Dit. SMI	(2.225,2)	-	(2.225,2)	(2.225,2)	-	(2.225,2)
KPA Satker BLU BPDLH	(800)	-	(800)	(800)	-	(800)
KPA Satker KBUMN	(2.564,7)	-	(2.564,7)	(2.564,7)	-	(2.564,7)

1) KPA Satker Ditrektorat SMI

Realisasi investasi Pemerintah klaster pangan dan lingkungan hidup yang dianggarkan kepada KPA Satker Direktorat SMI sampai dengan Tahun 2023 (audited) adalah sebesar (Rp2.225.200.000.000) atau 100% dari alokasi yang dianggarkan dalam DIPA. Alokasi tersebut merupakan alokasi kepada BLU BPDLH

2) KPA Satker BPDLH

Realisasi investasi Pemerintah klaster pangan dan lingkungan hidup yang dianggarkan kepada KPA Satker BPDLH sampai dengan Tahun 2023 (audited) adalah sebesar (800.000.000.000) atau 100% dari alokasi yang dianggarkan dalam DIPA. Alokasi tersebut merupakan alokasi untuk dana mangrove.

3) KPA Satker Kementerian BUMN

Realisasi Pembiayaan Investasi Pemerintah klaster pangan dan lingkungan hidup yang dianggarkan pada KPA Satker Kementerian BUMN sampai dengan Tahun 2023 (audited) adalah sebesar (Rp2.564.710.241.052) atau 100% dari alokasi yang dianggarkan dalam DIPA. Alokasi Pembiayaan Investasi Pemerintah klaster pangan dan lingkungan hidup sebesar (Rp2.564.710.242.000) merupakan PMN non tunai yang dialokasikan untuk PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

d. Investasi Klaster Kerja Sama Internasional

Realisasi investasi kerja sama internasional tahun 2023 sebesar Rp3.559.632.528.929 atau 100 persen dari alokasi yang telah dianggarkan dalam DIPA. Rincian realisasi klaster kerja sama internasional pada tahun 2023 dijelaskan pada tabel berikut.

(dalam miliar Rp)

Uraian	DIPA TA 2023			Realisasi Tahun 2023		
	Non PEN	PEN	Total	Non PEN	PEN	Total
Investasi Klaster Kerja Sama Internasional	(3.559,6)	-	(3.559,6)	(3.559,6)	-	(3.559,6)
KPA Satker BLU LDKPI	(2.000)	-	(2.000)	(2.000)	-	(2.000)
KPA Satker BKF	(1.559,6)	-	(1.559,6)	(1.559,6)	-	(1.559,6)

e. Investasi Pemerintah Lainnya

Realisasi investasi klaster lainnya tahun 2023 adalah sebesar Rp6.883.643.222.285 atau 100 persen dari alokasi yang dianggarkan dalam DIPA. Rincian alokasi investasi pemerintah lainnya pada Tahun 2023 dijelaskan pada tabel berikut.

(dalam miliar Rp)

Uraian	DIPA TA 2023			Realisasi Tahun 2023		
	Non PEN	PEN	Total	Non PEN	PEN	Total
Investasi Klaster Lainnya	**(6.883,7)**	**-**	**(6.883,7)**	**(6.883,7)**	**-**	**(6.883,7)**
KPA Satker KBUMN	(6.883,7)	-	(6.883,7)	(6.883,7)	-	(6.883,7)

f. Investasi Pemerintah

Realisasi investasi Pemerintah tahun 2023 adalah sebesar Rp1.047.519.139.000 atau 100 persendari alokasi yang dianggarkan dalam DIPA. Rincian alokasi dan realisasi investasi Pemerintah pada tahun 2023 dijelaskan pada tabel berikut.

(dalam miliar Rp)

Uraian	DIPA TA 2023			Realisasi Tahun 2023		
	Non PEN	PEN	Total	Non PEN	PEN	Total
Investasi Pemerintah	**-**	**(1.047,5)**	**(1.047,5)**	**-**	**(1.047,5)**	**(1.047,5)**
KPA Satker KBUMN	-	(1.047,5)	(1.047,5)	-	(1.047,5)	(1.047,5)

Alokasi realisasi investasi Pemerintah merupakan alokasi pada Satker Kementerian BUMN yang dialokasikan pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Alokasi pembiayaan investasi tersebut merupakan pembiayaan investasi dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

B.2.4.1.8. Pengeluaran Kewajiban Penjaminan

Realisasi Pengeluaran Kewajiban Penjaminan tahun 2023 sebesar Rp330.511.505.000 atau 100 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBN 2023 (Perpres 75 Tahun 2023) sebesar Rp330.511.505.000. Realisasi tersebut terdiri dari anggaran untuk Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional sebesar Rp296.151.505.000 dan sebesar Rp34.360.000.000 merupakan penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN. Kewajiban penjaminan digunakan untuk penugasan percepatan pembangunan infrastruktur nasional dan penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN. Namun demikian, untuk mengantisipasi kondisi gagal bayar (default) dari pihak terjamin dalam mendukung kedua program penugasan infrastruktur tersebut, Pemerintah akan menggunakan dana kewajiban penjaminan dalam rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dan rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah. Rincian realisasi kewajiban Tahun 2023 dijelaskan pada tabel berikut.

No	Penjaminan	Alokasi berdasarkan UU APBN 2023	Realisasi 2023	%
1	**Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional**	**(296.151.505.000)**	**(296.151.505.000)**	**100**
	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara	(7.702.826.000)	(7.702.826.000)	**100**
	Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	(159.828.050.000)	(159.828.050.000)	**100**
	Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara	(6.744.701.000)	(6.744.701.000)	**100**
	Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	(96.767.407.000)	(96.767.407.000)	**100**
	Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Light Rail Transit/LRT Jabodebek	(18.727.251.000)	(18.727.251.000)	**100**
	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW (infrastruktur Ketenagalistrikan)	(6.381.270.000)	(6.381.270.000)	**100**
2	**Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah Kepada BUMN**	**(34.360.000.000)**	**(34.360.000.000)**	**100**
Total		(330.511.505.000)	(330.511.505.000)	**100%**

B.2.4.1.9. Pengeluaran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

Realisasi Pengeluaran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Tahun 2023 adalah sebesar Rp20.000.000.000.000 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2023 (Perpres 75 Tahun 2023) sebesar Rp20.000.000.000.000. Realisasi tersebut sama dengan tahun sebelumnya.
Realisasi tersebut merupakan pencairan Dana Abadi Pendidikan kepada BLU LPDP. LPDP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Pengeluaran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) baik dana abadi pendidikan *(endowment fund)* maupun dana cadangan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dana Abadi di Bidang Pendidikan yang dikelola LPDP sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 meliputi Dana Abadi Pendidikan (DAP), Dana Abadi Penelitian (DAPL), Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT), dan Dana Abadi Kebudayaan (DAKB). Anggaran pembiayaan dana abadi tahun 2023 sebesar Rp20.000.000.000.000 telah dicairkan seluruhnya. Total akumulasi pokok dana abadi per 31 Desember 2023 telah mencapai Rp139.107.700.000.000. Adapun rincian akumulasi pencairan Dana Abadi di Bidang Pendidikan disajikan pada tabel berikut.

Uraian	Akumulasi sd 31 Desember 2022	Pencairan TA 2023	Akumulasi sd 31 Desember 2023
DAP	101.117.700.000.000	10.000.000.000.000	111.117.700.000.000
DAPL	7.990.000.000.000	5.000.000.000.000	12.990.000.000.000
DAPT	7.000.000.000.000	3.000.000.000.000	10.000.000.000.000
DAKB	3.000.000.000.000	2.000.000.000.000	5.000.000.000.000
Jumlah	**119.107.700.000.000**	**20.000.000.000.000**	**139.107.700.000.000**

B.2.4.1.10. Pembiayaan Lain-Lain

Realisasi Pembiayaan Lain-Lain Tahun 2023 adalah sebesar Rp148.514.851.485 yang berasal dari UAPBUN TK DJKN satker BPLS (999980) yaitu PT Minarak Lapindo Jaya telah melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp148.514.851.485 tetapi sampai saat ini belum melunasi pinjaman Dana Antisipasi untuk pembelian Tanah dan Bangunan warga korban luapan lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak (PAT) 22 Maret 2007.

B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri

Realisasi pembiayaan luar negeri adalah sebesar Rp79.294.046.895.068 atau 430,12 persen dari anggaran sebesar Rp18.435.249.833.000. Angka realisasi pembiayaan luar negeri berasal dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp162.650.352.798.218 dan pengeluaran pembiayaan sebesar

Rp83.356.305.903.150. Penerimaan pembiayaan berasal dari penarikan pinjaman luar negeri berupa pinjaman tunai sebesar Rp82.990.780.840.684 dan pinjaman kegiatan sebesar Rp79.659.571.957.534. Sedangkan pengeluaran pembiayaan berupa pemberian pinjaman sebesar Rp1.905.999.112.657 dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp81.450.306.790.493.

B.2.4.2.1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri Tahun 2023 adalah sebesar Rp162.650.352.798.218 atau sebesar 262,10 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2023 (Perpres 75 Tahun 2023) sebesar Rp62.056.062.121.000. Dengan demikian realisasi Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp54.367.269.211.617 atau 50,21 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp108.283.083.586.601.

Penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari (i) penarikan pinjaman tunai dan (ii) penarikan pinjaman kegiatan. Penarikan Pinjaman Luar Negeri Tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2022, yaitu sebesar 46% dikarenakan penarikan pinjaman tunai yang merupakan bagian dari strategi pengelolaan utang Tahunan.

B.2.4.2.1.1. Penarikan Pinjaman Tunai

Realisasi Pinjaman tunai Tahun 2023 adalah sebesar Rp 82.990.780.840.684 atau sebesar 281,32 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2023 (Perpres 75 Tahun 2023) sebesar Rp29.500.000.000.000. Dengan demikian realisasi Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp17.398.069.401.018 atau 26,52 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp65.592.711.439.666.

Peningkatan penarikan pinjaman tunai dilakukan dengan menggunakan opsi fleksibilitas pembiayaan utang sesuai dengan pasal 32 UU APBN 2023 dimana pemerintah dapat merubah komposisi instrumen pembiayaan utang dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal, dengan mempertimbangkan ketersediaan instrumen utang. Optimalisasi pinjaman tunai dimaksudkan untuk mengamankan pembiayaan utang tahun 2023 ditengah kondisi pasar keuangan yang sedang volatile. Kondisi ini terjadi pada tahun 2023 dimana target lelang SBN dalam beberapa kesempatan tidak tercapai dan memiliki *cost of fund* yang relatif tinggi.

Pinjaman tunai dapat menggunakan *policy matrix*, yaitu kumpulan kebijakan yang digunakan sebagai *underlying* dalam proses pencairan pinjaman. Untuk pinjaman tunai ini, setelah terpenuhinya *policy matrix* akan dilakukan negosiasi dan penandatanganan *loan agreement*, selanjutnya akan dilakukan pencairan. Pinjaman tunai juga dapat menggunakan *modalitas Program for Result* (PforR) *dan Investment Project Financing with Performance Based Conditions (IPF with PBC's)* dimana untuk PfR pengukuran capaian menggunakan *Disbursement Linked Indicators* yang selanjutnya disingkat DLIs. DLIs merupakan indikator-indikator berupa target-target yang harus dicapai oleh *executing agency/implementing agency*. Dalam proses pencairan pinjaman, DLIs terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Independent Verification Agency (IVA) yang disepakati antara Pemerintah dan *lender* dalam beberapa pinjaman tunai yang ditunjuk adalah BPKP. Hasil verifikasi tersebut akan dijadikan dasar penarikan pinjaman tunai. Untuk pinjaman dengan modalitas IPF with PBC seperti pinjaman *Mangrove for Coastal Resilience* (M4CR) dilakukan penarikan setelah target PBC dicapai oleh *executing agency/implementing agency*. Untuk pinjaman M4CR juga dilibatkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebagai *fund manager*. Daftar pinjaman tunai dengan menggunakan

policy matrix dan DLIs / PBC untuk penarikan pinjaman tunai Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

No	*Lender*	Program	*Policy Matrix/Output/Pilar*	
1	WB	*Disaster Risk Finance and Insurance (IPF with PBCs)*	*1*	*Performance Based Conditions (PBC)*
2	WB	*Financial Sector Development Policy Loan 3*	*1*	*Increasing the depth of the financial sector*
			2	*Improving the efficiency of the financial sector*
			3	*Strengthening the resilience of the financial sector*
3	WB	*Investing in Nutrition and Early Years*	*1*	*Disbursement Linked Indicators (DLI)*
4	WB	*Strengthening Nation Tuberculosis Response Program*	*1*	*Disbursement Linked Indicators (DLI)*
5	WB	*Indonesia Universal Health Coverage Development Policy Loan*	*1*	*To increase the number of practicing medical doctors*
			2	*To increase the number of medical doctors who graduated from abroad*
			3	*To increase the number of non-Indonesian specialist medical doctors*
			4	*To increase the number of specialist medical doctors across Indonesia*
			5	*To increase health system resilience*
6	ADB	*Promoting Innovative Financial Inclusion Program 2 (PIFIP – 2) - PBL*	*1*	*Tools and infrastructure for financial inclusion*
			2	*Access to finance by micro, small, and medium-sized enterprizes (MSMEs) and marginalized groups including women and youth*
			3	*Supervision and consumer protection measures for responsibles financial inclusion*
7	ADB	*Stated-Owned Enterprise/SOE Reform (PBL)*	*1*	*Efficiency and resilience of SOEs improved*
			2	*Corporate governance framework for SEOs strengthened*
8	ADB	*Sustainable and Inclusive Energy Program – Sub Program 3*	*1*	*Sector governance improved*
			2	*Markets for private sector participation enabled*
			3	*Regulatory environment for increased access to clean energy and energy efficiency improved*
9	ADB	*Competitiveness, Industrial Modernization and Trade Acceleration Program, Sub Program 2 (PBL)*	*1*	*Creating and enabling environment for investments*
			2	*Easing barriers to trade*
			3	*Growing and upscaling enterprises*
10	AIF	*Co-financing Sustainable and Inclusive Energy Program – Sub Program 3*	*1*	*Sector governance improved*
			2	*Markets for private sector participation enabled*
			3	*Regulatory environment for increased access to clean energy and energy efficiency improved*
11	KfW	*Co-financing Sustainable and Inclusive Energy Program – Sub Program 3*	*1*	*Sector governance improved*
			2	*Markets for private sector participation enabled*
			3	*Regulatory environment for increased access to clean energy and energy efficiency improved*
12	KfW	*Co-financing Indonesia Emergency Response to Covid-19 AF (PfR)*	*1*	*Disbursement Linked Indicators (DLI)*
13	EDCF	*Co-financing competitiveness, Industrial Modernization and Trade Acceleration Program, Sub Program 1*	*1*	*Creating and enabling environtment for investment*
			2	*Easing barriers to trade*
			3	*Growing and upscaling enterprises*
14	EDCF	*Co-financing Sustainable and Inclusive Energy Program – Sub Program 3*	*1*	*Sector governance improved*
			2	*Markets for private sector participation enabled*
			3	*Regulatory environment for increased access to clean energy and energy efficiency improved*
15	JICA	*Disaster Risk Enhancement and Management Program (DREAM) 3*	*1*	*Strengthening Disaster Risk Reduction governance and mainstreaming*
			2	*Promotion of understanding disaster risk*
			3	*Promotion of investing in disaster reduction for resilience*
			4	*Enhancing to build back better in recovery, rehabilitation and reconstruction*
16	JICA	*Co-financing Competitiveness, Industrial Modernization and Trade Acceleration Program, Sub Program 1*	*1*	*Creating and enabling environtment for investment*
			2	*Easing barriers to trade*
			3	*Growing and upscaling enterprises*
17	AFD	*Co-financing Disaster Risk Enhancement and Management Program 3*	*1*	*Strengthening Disaster Risk Reduction governance and mainstreaming*
			2	*Promotion of understanding disaster risk*
			3	*Promotion of investing in disaster reduction for resilience*
			4	*Enhancing to build back better in recovery, rehabilitation and reconstruction*

Pada Tahun Anggaran 2023, terdapat pinjaman tunai yang ditujukan untuk pembiayaan *COVID*-19 sebagaimana termuat pada tabel berikut:

No.	Negara	Lender	MTU	Jumlah Valas	Jumlah Rupiah	Nama Program
1	GERMANY	KfW	EUR	4.800.000	78.678.912.000	Indonesia Emergency Response
Total					**78.678.912.000**	

B.2.4.2.1.2. Penarikan Pinjaman Kegiatan

Realisasi penarikan pinjaman kegiatan Tahun 2023 adalah sebesar Rp79.659.571.957.534 atau sebesar 244,68 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2023 (Perpres 75 Tahun 2023) sebesar Rp 32.556.062.121.000. Dengan demikian realisasi Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp36.969.199.810.599 atau 86,60 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp 42.690.372.146.935. Kenaikan realisasi Pinjaman Proyek disebabkan terjadinya akselerasi dalam pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana awal yang bertujuan untuk mempercepat penyelesaian kegiatan. Pinjaman kegiatan merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek pembangunan tertentu yang menjadi prioritas pembangunan yang disusun oleh BAPPENAS dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah, berdasarkan usulan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan BUMN.

B.2.4.2.2. Pemberian Pinjaman

Realisasi pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman luar negeri Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.905.999.112.657 atau 178,93 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2023 (Perpres 75 Tahun 2023) sebesar Rp1.065.247.517.000. Realisasi pemberian pinjaman mengalami penurunan sebesar Rp100.610.328.054 atau turun 5,57 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.805.388.784.603.

Pengeluaran Pembiayaan Pemberian Pinjaman dalam laporan ini hanya terdiri dari Pemberian pinjaman Luar Negeri meliputi:

a. Pemberian Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Tahun Anggaran Berjalan
   Realisasi Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada Daerah Tahun Anggaran Berjalan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp286.277.630.136 dan Rp21.460.809.305. Realisasi pada Tahun 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp264.816.820.831 atau naik 1.233,96% bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember Tahun 2022.
b. Pemberian Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan
   Realisasi Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.619.721.482.521,00 dan Rp1.783.927.975.298,00. Realisasi pada Tahun 2023 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp164.206.492.777,00 atau turun 9,20% bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2022.

Realisasi ini berdasarkan dokumen Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) Periode Januari – Desember 2023 yang diterbitkan atas Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada 3 (tiga) BUMN, yaitu PT. Perusahaan Listrik Negara, PT. Sarana Multi Infrastruktur, dan PT. Pertamina dan 1 Pemda yaitu Pemprov. DKI Jakarta, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama BUMN	Cara Penarikan	Jumlah (Rp)
1.	PT. Perusahaan Listrik Negara	PP	788.942.000
		PL	173.316.614.712
		LC	160.248.321.005
		Jumlah	**334.353.877.717**
2.	PT. Pertamina	PL	124.210.193.894
		Jumlah	**124.210.193.894**
3.	PT. SMI	PL	1.161.157.410.910
		Jumlah	**1.161.157.410.910**
4	Pemprov DKI Jakarata	PL	286.277.630.136
		Jumlah	**286.277.630.136**
Jumlah Keseluruhan			**1.905.999.112.657**

Tabel di bawah ini menampilkan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pemberian Pinjaman dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan Tahun 2023.

Tahun	Pagu DIPA	Realisasi	Persentase (%)
2015	3.443.584.540.000,00	2.576.441.229.912,00	74,82
2016	5.833.652.760.000,00	5.117.915.204.933,00	87,73
2017	7.894.631.273.000,00	6.868.916.465.167,00	87,01
2018	9.872.409.868.000,00	9.099.739.735.235,00	92,17
2019	6.221.641.822.000,00	5.716.481.102.382,00	91,88
2020	3.843.293.750.000,00	3.631.888.376.473,00	94,50
2021	2.482.449.871.000,00	1.994.500.362.196,00	80,34
2022	1.855.637.559.000,00	1.805.388.784.604,00	97,29
2023 *)	2.442.299.243.000,00	1.905.999.112.657,00,	78,04

*) berdasarkan SP3 TA 2022 yang terbit s.d. 31 Desember 2023

B.2.4.2.3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Tahun 2023 adalah sebesar Rp81.450.306.790.493 atau 102,55 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2023 (Perpres 75 Tahun 2023) sebesar Rp79.426.064.437.000. Atas hal tersebut, realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.168.401.545.036 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp79.281.905.245.457 atau 2,74 persen. Realisasi tersebut lebih besar dari yang dianggarkan dalam APBN disebabkan oleh adanya penguatan kurs pada saat transaksi pembayaran. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar negeri yang jatuh tempo pada TA 2023.

Realisasi pengeluaran pembiayaan Utang Luar Negeri terdiri dari:

i. Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Pinjaman Tunai Realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman tunai sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp41.620.171.896.141.

ii. Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Pinjaman Kegiatan Realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman kegiatan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp39.830.134.894.352.

Debitur	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Program	41.620.171.896.141	37.619.613.777.567	10,63
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Proyek	39.830.134.894.352	41.662.291.467.890	(4,40)
Jumlah	81.450.306.790.493	79.281.905.245.457	2,74

B.2.5. Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran –SiKPA

Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran–SiKPA Tahun 2023 sebesar minus Rp1.339.513.221.789.647 atau 104,90 persen dari jumlah yang dianggarkan Tahun 2023 sebesar minus Rp1.276.917.533.598.000. Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran–SiKPA merupakan penjumlahan dari defisit anggaran sebesar minus Rp1.696.176.969.504.168 dan Pembiayaan Neto sebesar Rp356.663.747.714.521. Atas hal tersebut, realisasi Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran–SiKPA Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar minus Rp157.245.205.649.695 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar minus Rp1.182.268.016.139.947 atau 13,30 persen

CATATAN PENTING LAINNYA

A. BA BUN 999.01

Pada LK BA BUN Pengelolaan Utang 999.01 Tahun 2023 terdapat informasi tambahan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, Pemerintah merespon kejadian luar biasa pandemi COVID 19 dengan memberikan tambahan alokasi belanja yang sangat signifikan untuk Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Negara (PC-PEN). Di sisi lain, terdapat penurunan kapasitas penerimaan negara sebagai dampak pandemi Covid-19, yang menyebabkan peningkatan defisit APBN dan peningkatan kebutuhan pembiayaan, baik dari utang maupun non-utang. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk pemenuhan pembiayaan melalui utang. Dukungan pembiayaan utang tersebut dilakukan melalui penerbitan KB I tahun 2020 (Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 190/KMK.08/2020 dan Nomor 22/4/KEP.GBI/2020 jo. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 565/KMK.08/2020 dan Nomor 22/15/KEP.GBI/2020). Dukungan BI juga berlanjut melalui mekanisme pembagian beban (burden sharing) antara Pemerintah dan BI yang disepakati dalam SKB II tahun 2020 (Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 326/KMK.08/2020 dan Nomor 22/8/KEP.GBI/2020 jo. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 347/KMK.08/2020 dan Nomor 22/9/KEP.GBI/2020). Sesuai SKB II, BI membeli SBN yang diperuntukkan untuk *Public Goods* (PG) dan menanggung seluruh beban yang timbul sampai dengan SBN tersebut jatuh tempo. Selain itu, BI dan Pemerintah juga berbagi beban (*burden sharing*) biaya penerbitan SBN yang ditujukan untuk pembiayaan *Non-Public Goods* (NPG). Penerbitan SBN untuk pemenuhan pembiayaan PG dan NPG sesuai SKB II hanya dilakukan pada tahun 2020, yaitu melalui 8 kali transaksi *private*

placement dengan nilai Rp397,56 triliun untuk PG dan 9 kali lelang dengan nilai Rp177,03 triliun untuk NPG.

Selanjutnya, pemenuhan pembiayaan utang pada tahun 2021 masih menghadapi tantangan-tantangan di tengah ketidakpastian pasar keuangan, diantaranya kondisi pandemi yang masih berlanjut dan munculnya varian baru virus Covid-19, konsumsi masyarakat yang masih terbatas, belum pulihnya aktivitas dunia usaha, serta masih rendahnya pertumbuhan kredit pada sektor perbankan. Menyebarnya varian delta mengharuskan Pemerintah memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan berdampak pada peningkatan pembiayaan utang Pemerintah. Peningkatan pembiayaan tersebut utamanya untuk penanganan kesehatan dan kemanusiaan serta upaya untuk pemulihan ekonomi tetap *on track*.

Merespon kondisi tersebut, pada bulan Agustus 2021, Pemerintah kembali melanjutkan kerjasama dengan Bank Indonesia melalui SKB III (Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI Nomor 347/KMK.08/2021 dan Nomor 23/11/KEP.GBI/2021 tentang skema dan mekanisme koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak pandemi *corona virus disease* 2019 (Covid-19) melalui penerbitan Surat Utang Negara dan atau Surat Berharga Syariah Negara oleh Pemerintah dan pembelian di Pasar perdana oleh BI). Perjanjian kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan koordinasi penerbitan SUN dan/atau SBSN oleh Pemerintah, serta pembeliannya di pasar perdana oleh Bank Indonesia, serta dasar mekanisme kerja sama antara Pemerintah dan Bank Indonesia guna menurunkan beban keuangan negara untuk pendanaan Anggaran Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan. Besaran nilai SBN sesuai kesepakatan adalah sebesar Rp439 triliun, yang direalisasikan tahun 2021 sebesar Rp215 triliun dan tahun 2022 sebesar Rp224 triliun.

SBN yang diterbitkan pemerintah sesuai SKB II dan SKB III, khususnya dengan seri VR yang dibeli di pasar perdana, bersifat *tradable* dan *marketable* sehingga dapat dipergunakan BI untuk pelaksanaan operasi moneter. Dengan meningkatnya kepemilikan SBN *tradable* oleh BI maka kondisi ini sejalan dengan kebijakan untuk penggunaan SBN dalam operasi moneter, yang pada akhirnya dapat mendorong likuiditas pasar SBN.

Dari sisi Pemerintah, SBN dalam rangka SKB II dan III merupakan SBN dengan tingkat bunga mengambang, sehingga dapat menjadi penyeimbang portofolio utang. Dengan kondisi tersebut, SBN dimaksud diperkirakan akan dipertahankan sampai dengan jatuh tempo untuk mendukung keseimbangan portofolio dalam mewujudkan portofolio optimum. Di samping itu, SBN yang diterbitkan memiliki biaya yang lebih rendah sehingga dengan mempertahankan sampai dengan jatuh tempo maka dapat menunjang tercapainya kesinambungan fiskal pemerintah dan dapat memenuhi kebutuhan BI dalam operasi moneter.

Selanjutnya, realisasi kontribusi yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah, diakui serta dicatat oleh Pemerintah sebagai pengurang beban/belanja bunga sebagaimana tujuan skema *burden sharing*. Bank Indonesia memberikan kontribusi untuk menanggung sebagian beban belanja bunga yang ditanggung Pemerintah. Pada Tahun 2023 rincian kontribusi Bank Indonesia sebagai berikut:

Tabel Porsi Pemerintah dan BI dalam skema *burden sharing*

No	Bulan	Porsi Bank Indonesia	Porsi Pemerintah	Total
A. Public Goods				
1	Januari	900.596.250.000	-	900.596.250.000
2	Februari	1.792.186.000.000	-	1.792.186.000.000
3	Maret	3.100.967.700.000	-	3.100.967.700.000
4	April	1.080.898.840.000	-	1.080.898.840.000
5	Mei	2.270.632.740.000	-	2.270.632.740.000
6	Juni	1.596.617.460.000	-	1.596.617.460.000
7	Juli	2.389.736.300.000	-	2.389.736.300.000
8	Agustus	2.248.414.520.000	-	2.248.414.520.000
9	September	2.858.143.800.000	-	2.858.143.800.000
10	Oktober	1.063.634.100.000	-	1.063.634.100.000
11	November	2.210.271.320.000	-	2.210.271.320.000
12	Desember	2.844.745.930.000	-	2.844.745.930.000
SUBTOTAL KONTRIBUSI BI UNTUK PG		**24.356.844.960.000**	**-**	**24.356.844.960.000**
B. Non Public Goods				
1	Juni	540.629.753.425	4.466.588.153.425	5.007.217.906.850
2	Desember	446.619.175.471	4.602.937.677.953	5.049.556.853.424
SUBTOTAL KONTRIBUSI BI UNTUK NPG		**987.248.928.896**	**9.069.525.831.378**	**10.056.774.760.274**
C. Cluster A				
1	Januari	276.095.493.750	-	276.095.493.750
2	Februari	133.224.244.740	-	133.224.244.740
3	Maret	1.024.746.069.180	-	1.024.746.069.180
4	April	342.161.591.700	-	342.161.591.700
5	Mei	139.828.734.000	-	139.828.734.000
6	Juni	921.910.000.000	-	921.910.000.000
7	Juli	488.079.393.230	-	488.079.393.230
8	Agustus	137.709.317.340	-	137.709.317.340
9	September	1.051.215.239.580	-	1.051.215.239.580
10	Oktober	336.825.567.900	-	336.825.567.900
11	November	135.352.455.660	-	135.352.455.660
12	Desember	1.035.454.514.150	-	1.035.454.514.150
SUBTOTAL KONTRIBUSI BI UNTUK CLUSTER A		**6.022.602.621.230**	**-**	**6.022.602.621.230**
TOTAL KONTRIBUSI BI UNTUK PG, NPG DAN CLUSTER A		**31.366.696.510.126**	**9.069.525.831.378**	**40.436.222.341.504**

2. Sampai dengan Tahun 2023, pagu dan realisasi SBSN proyek per masing-masing Kementerian/Lembaga sebagai berikut:

Tabel Pagu dan Realisasi SBSN Proyek

NO	Kementerian/Lembaga	Pagu	Realisasi
1	KEMENTERIAN PERTAHANAN	1.508.265.154.000	1.508.145.579.350
2	KEMENTERIAN PERTANIAN	311.043.764.000	228.906.276.418
3	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	159.552.306.000	159.249.488.326
4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	9.034.303.231.000	7.834.041.071.447
5	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	2.685.697.841.000	2.107.721.106.112
6	KEMENTERIAN AGAMA	2.598.693.572.000	2.567.240.465.862
7	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	26.986.840.000	24.854.393.207
8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	20.053.858.190.000	18.705.161.276.686
9	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	335.017.497.000	332.817.815.402
10	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	346.507.690.000	346.008.011.447
11	BADAN KEAMANAN LAUT	155.737.065.000	155.736.492.120
12	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	519.352.336.000	332.921.782.100
	JUMLAH	**37.735.015.486.000**	**34.302.803.758.477**

Sumber: Data realisasi SBSN proyek per Januari 2024

Realisasi pelaksanaan SBSN proyek TA 2023 s.d 31 Desember 2023 adalah 90,90% (dari total alokasi termasuk lanjutan/luncuran). Secara umum, kinerja pelaksanaan SBSN proyek TA 2023 tersebut cukup baik dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata kinerja 5 tahun terakhir sebesar 86,3%

3. Nilai realisasi proyek SBSN *Single Year Contract* (SYC) yang dilanjutkan pelaksanaannya dari tahun 2022 ke tahun 2023 per masing-masing Kementerian/Lembaga sebagai berikut:

Tabel Nilai Proyek SBSN SYC Tahun 2022 yang Dilanjutkan Pelaksanaannya ke Tahun 2023

NO	Kementerian/Lembaga	Pagu	Realisasi
1	KEMENTERIAN PERTANIAN	27.516.765.556	27.515.765.000
2	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	36.939.298.559	36.939.298.538
3	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKONOLOGI	42.760.332.520	29.926.050.000
4	KEMENTERIAN AGAMA	28.943.872.774	28.933.325.192
5	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	11.860.674.098	9.660.841.040
6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	132.051.654.911	88.342.485.593
	JUMLAH	**280.072.598.418**	**221.317.765.363**

4. Nilai proyek SBSN *Single Year Contract* (SYC) 2023 yang akan dilanjutkan pelaksanaannya ke tahun 2024 berdasarkan rekonsiliasi data lanjutan 2023 ke 2024 yang dilakukan antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian/Lembaga dan menjadi dasar untuk proses revisi anggaran yang dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

Tabel Nilai Proyek SBSN SYC Tahun 2023 yang Dilanjutkan Pelaksanaannya ke Tahun 2024

	Kementerian/Lembaga	Pagu
1	KEMENTERIAN PERTANIAN	22.138.608.338
2	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	47.368.465.474
3	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	62.759.626.159
4	KEMENTERIAN AGAMA	60.432.822.954
5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	81.834.469.605
	JUMLAH	**274.533.992.530**

5. Berdasarkan hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan Tahun 2023, terdapat dua Kementerian/Lembaga dengan total nilai sebesar Rp4.387.168.901 yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri belum dapat dilakukan pengesahan dikarenakan ketidakcukupan pagu anggaran sehingga belum terdapat pencatatan pada aplikasi SPAN, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Daftar Kementerian Lembaga belum SP3 yang bersumber dari Pinjaman

No	Kementerian/Lembaga	Nilai Rupiah
1	BPIW PUPR	2.828.286.356
2	KEMENHUB	1.558.882.545
	Grand Total	**4.387.168.901**

6. Pada Tahun 2023. Direktorat Pengelolaan Kas Negara telah melakukan pengembalian dana *(refund)* kepada Lender sebesar Rp390.944.713.170 dikarenakan adanya *refund* administratif dan *refund ineligible*. *Refund* merupakan koreksi nilai ekuitas tahun lalu. sehingga tidak

mempengaruhi akun penarikan pinjaman kegiatan. Rincian *refund* termuat pada tabel sebagai berikut:

Refund (*Ineligible* dan Prosedur Administratif)

No	*Loan Id*	Register	Kementerian Lembaga	*Lender*	Nilai Rupiah
Refund Administratif					**-389,158,844,663**
1	20419000	18K6ECNA	KEMEN PU & PERA	IBRD	-1,398,202,792
2	20422000	1LF9UFAA	PT. S M I	IBRD	-73,969,570,286
3	20426000	1HG72SWA	KEMEN PU & PERA	IBRD	-231,826,085,278
4	20600001	1PTDQQAA	KEMEN PU & PERA	AIIB	-1,398,202,636
5	20600003	145E6FTA	PT. S M I	AIIB	-73,969,570,288
6	20999011	1VFX57JA	KEMEN PU & PERA	IDB	-7,830,199
7	20999012	1ENYRFPA	KEMEN PU & PERA	IDB	-5,167,592,562
8	20999013	1NT81PXA	KEMEN PU & PERA	IDB	-1,421,790,623
Refund Ineligible					**-1,785,868,507**
9	20408000	10864001	KEMENRISTEKDIKTI	IBRD	-67,003,781
10	20418000	1NPB3NNA	KEMEN PU & PERA	IBRD	-69,922,307
11	20433000	1M1JWRAA	BPIW PUPR	IBRD	-67,634,025
12	21245000	10883301	KEMEN PU & PERA	ADB	-1,581,308,394
	JUMLAH				**-390,944,713,170**

7. Penundaan Pembayaran kepada *Lender* Rusia

Akibat adanya sanksi pembatasan transaksi dan penutupan SWIFT terhadap entitas utama di Rusia. Pemerintah Rusia menyampaikan kebijakan pemberian penangguhan pembayaran utang sementara untuk Pemerintah Indonesia. Akibat penundaan tersebut. terdapat pembayaran pokok dan bunga yang ditunda pembayarannya sebesar USD33.4 Juta sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Penundaan Pembayaran kepada Lender Rusia

LOAN_ID	MTU	POKOK	BUNGA	TOTAL
23901000	USD	4.250.000	285.942	4.535.942
23902000	USD	4.768.500	448.948	5.217.448
23903000	USD	4.760.000	576.039	5.336.039
23904000	USD	255.000	30.859	285.859
23906000	USD	4.590.000	802.115	5.392.115
23907000	USD	424.261	74.141	498.401
23908000	USD	9.690.000	2.474.409	12.164.409
Grand Total		**28.737.761**	**4.692.453**	**33.430.214**

Terkait dengan rencana pembayaran kembali ke Rusia, hingga saat ini rencananya akan menggunakan Chinese Yuan (CNY) sebagai mata uang pembayaran dan bank koresponden yang berada di China (Bank of China), sehingga pinjaman dengan Rusia yang menggunakan mata uang US Dollar akan ditranslasi ke Chinese Yuan dengan kurs USD/CNY. Mekanisme pembayarannya akan dibagi menjadi 2 tahap, tahap pertama pembayaran adalah untuk menguji keberhasilan metode pembayaran menggunakan Chinese Yuan, lalu pembayaran tahap kedua sebesar sisa nilai terutang sejak berlakunya sanksi terhadap Rusia hanya akan dilakukan apabila pembayaran pertama telah berhasil diterima oleh pihak lender di Rusia.

Berdasarkan draft amandement yang sedang dalam proses pembahasan, jika memang disepakati, pembayaran yang tertunda tersebut akan diselesaikan paling lama 60 hari kalender Terhadap penundaan pembayaraan tersebut, Pemerintah Rusia menyatakan tidak mengenakanbiaya tambahan.

B. BA BUN 999.02

1. Penyusunan Laporan Keuangan UAP BUN BA 999.02 Tahun 2023 mencakup pendapatan hibah terencana maupun langsung yang telah dilakukan pengesahan sesuai amanat PMK Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah serta PMK Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah. serta PMK Nomor 195/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

2. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 PMK Nomor 99/PMK.05/2017 bahwa PA/KPA yang menerima Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga membuat dan menandatangani BAST bersama dengan Pemberi Hibah. Berdasarkan pasal tersebut. sepanjang belum terdapat BAST antara pemberi dan penerima hibah. baik K/L maupun Kementerian Keuangan belum dapat mengakui hal tersebut sebagai pendapatan hibah tahun berjalan. Hal tersebut karena belum terdapat perpindahan kepemilikan serta peralihan hak dan kewajiban dari donor kepada penerima hibah.

3. PMK Nomor 195/PMK.05.2019 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri. menyatakan bahwa “Dalam hal Pemberi PHLN tidak menyampaikan NoD dalam batas waktu yang wajar. Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi. Akuntansi dan Setelmen dapat menggunakan rekening koran yang menunjukkan nomor rekening. nama rekening. dan nilai transfer sesuai dengan Surat Penarikan Dana (*withdrawal application*) untuk digunakan sebagai dasar penerbitan surat perintah pembukuan Penarikan PHLN”.

C. BA BUN 999.03

Pada tahun 2023, BLU BPDLH mendapatkan alokasi sebesar Rp800.000.000.000 yang merupakan alokasi untuk dana rehabilitasi mangrove.

Ketentuan proses bisnis pengelolaan dana rehabilitasi mangrove berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Rehabilitasi Mangrove, yang secara substansi mengatur fund flow pembentukan dana cadangan rehabilitasi mangrove dari rekening kas umum negara untuk dikelola oleh Satker BPDLH dan penyaluran atas penggunaan dana cadangan rehabilitasi oleh Satker BPDLH kepada Satker BRGM untuk dipertanggungjawabkan sebagai realisasi anggaran Satker BRGM. Berdasarkan uraian tersebut, dalam pengelolaan Dana Rehabilitasi Mangrove melibatkan 2 (dua) Satuan Kerja, yaitu BUN 999.03 BPDLH dan BA K/L BRGM, serta 1 (satu) Satuan Kerja BA K/L BPDLH.

Alokasi sebesar Rp800.000.000.000 telah dicairkan dari RKUN ke rekening Dana Kelolaan BPDLH. Realisasi ini merupakan realisasi pencairan alokasi anggaran dengan akun 727151 Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah pada BLU. Selanjutnya, Satker BRGM melakukan pengesahan belanja ke KPPN yang dananya bersumber dari Dana Kelolaan BPDLH tersebut dengan akun potongan 717151 Penerimaan Pembiayaan untuk Pembentukan

Dana Cadangan Pemerintah pada BLU sebesar Rp4.997.550.000. Sehingga, nilai pada pos PMN / Dana Investasi Pemerintah yang tersaji dalam face LRA adalah nilai netto dari akun 727151 dan 717151 tersebut, yaitu sebesar Rp(795.002.450.000) (99,38% dari anggaran).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Rehabilitasi Mangrove, kegiatan rehabilitasi mangrove dilaksanakan oleh BRGM dengan menggunakan dana yang disalurkan melalui BLU BPDLH. BRGM menggunakan mekanisme pengesahan belanja atas beban DIPA Kementerian/Lembaga (K/L), sedangkan BLU BPDLH dalam mencairkan dana dari RKUN menggunakan mekanisme Bagian Anggaran BUN 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah. Adapun teknis pencatatan akuntansinya, mengacu pada Petunjuk Teknis Akuntansi (PTA) 18: Akuntansi Pengelolaan Dana Rehabilitasi Mangrove yang diterbitkan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu.

Rincian pengesahan belanja oleh BRGM selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah SP2D	Nominal (Rp)
Belanja Barang	1	2.050.550.000
Belanja Modal	1	2.947.000.000
Jumlah	**2**	**4.997.550.000**

D. BA BUN 999.04

Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN Tahun Anggaran 2023

1. PT PLN (Persero)

   Terdapat 3 (tiga) kegiatan/proyek yang masih dalam masa penarikan dan mendapat pembiayaan dari DIPA BA BUN 999.04, yaitu:

No	Nama Proyek	Lokasi Proyek	Kegiatan	Keterangan
1.	SLA-1214/DP3/2008 (*Asahan No. 3 Hydroelectric Power Plant Construction Project*)	Provinsi Sumatera Utara	Konstruksi	*Closing Date:* 31 Desember 2023
2.	SLA-1265/DSMI/2016 (*Hululais Geothermal Power Plant Project (E/S)*)	Provinsi Bengkulu	*Engineering Services*	*Closing Date:* 14 Oktober 2025
3.	SLA-1290/DSMI/2022 (*Development of Pumped Storage Hydropower in the Java-Bali System Project)*	Provinsi Jawa Barat	Konstruksi dan Konsultasi	*Closing Date:* 15 September 2027

Pendanaan loan JICA IP-532 tahun 2006 (SLA-1214 tahun 2008) saat ini tidak mencukupi untuk menyelesaikan seluruh pembangunan PLTA Asahan No. 3. Kekurangan pendanaan disebabkan karena sudah tidak relevannya harga yang direncanakan pada tahun 2006 dengan kondisi saat ini, sehingga butuh tambahan pendanaan untuk penyelesaian proyek yang diperkirakan akan selesai pada Maret 2024. Akibat keterlambatan pembebasan lahan

sehingga berimplikasi pada keterlambatan penyelesaian proyek dan perubahan total biaya konstruksi pembangunan, sehingga proyek memerlukan tambahan dana dan waktu untuk penyelesaian proyek. Tambahan dana berdasarkan Appraisal Mission dengan JICA yang tercantum dalam Minutes of Discussion tanggal 12-14 September 2022 sebesar JPY13.430.000.000 ekuivalen USD 99,48 juta (1 USD=JPY135). Menteri Keuangan melalui surat persetujuan nomor S-489/MK.05/2023 tanggal 7 Juni 2023 telah menetapkan persetujuan atas tambahan dana (additional loan) proyek PLTA Asahan No. 3 sebesar JPY13.430.000.000 dengan tenor 15 tahun (termasuk grace period 5 tahun). Saat ini Direktorat Pinjaman dan Hibah DJPPR sedang melakukan proses negosiasi Loan Agreement dengan pihak lender JICA. Selanjutnya Direktorat SMI akan memproses dokumen SLA setelah dokumen LA disepakati.

Untuk SLA-1265 tahun 2016 yang berasal dari pinjaman JICA IP-572 merupakan pembiayaan kegiatan engineering services kegiatan/proyek PLTP Hululais baik untuk kegiatan konsultasi perencanaan maupun konsultasi pelaksanaan konstruksi. Untuk kegiatan konstruksi PLTP Hululais rencana akan dibiayai dari pinjaman JICA, namun saat ini belum ada kesepakatan dengan lender JICA terkait pencantuman TKDN pada dokumen tender (lelang) untuk pekerjaan konstruksi PLTP Hululais.

Terdapat isu terkait pembiayaan dengan skema Subsidiary Loan Agreement (SLA) yaitu terkait pembiayaan proyek Development of Pumped Storage Hydropower in the Java-Bali System (‘Proyek UCPS’) yang memiliki kapasitas 1040 MW dengan original lenders IBRD dan AIIB. Adanya ketentuan dalam Pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah (PP) 10 Tahun 2011 menjadi kendala pada loan tambahan baru, mengingat telah dilakukan tanda tangan kontrak atas pekerjaan berdasarkan pendanaan loan sebelumnya. Biro Hukum Kementerian Keuangan telah menyampaikan tanggapan atas analisa hukum atas pendanaan proyek UCPS dalam kaitannya dengan PP 10 Tahun 2011 yang disampaikan Direktorat Sistem Manajemen Investasi DJPb. Adapun tanggapan terhadap permasalah kelanjutan pendanaan atas kontrak proyek UCPS, diperlukan langkah penyesuaian dalam bentuk side agreement yang ditandatangani oleh para pihak terkait, yakni:

a. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, World Bank, dan AIIB selaku para pihak yang menandatangani Loan Agreement (LA);

b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan PT PLN selaku para pihak yang menandatangani Subsidiary Loan Agreement; dan

c. PT PLN dan vendor selaku para pihak yang menandatangani Kontrak Proyek UCPS.

Dengan demikian, diharapkan pembiayaan proyek UCPS dapat menggunakan sumber dana dari loan tambahan baru yakni LA 9278/2021 dan LA L0512A/2022. Progres s.d. saat ini yaitu PT PLN sudah menyampaikan draft side letter kepada pihak lender dan DJPPR.

2. PT SMI

Terdapat 6 perjanjian penerusan pinjaman kepada PT SMI dalam masa penarikan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor SLA	Nomor LA	Tujuan Pinjaman	Lender	Plafon Pinjaman (USD)
1.	SLA-1268/DSMI/2017	8715-ID	Pembiayaan Indonesia Infrastructure Finance Facility	IBRD	200.000.000
2.	SLA-1269/DSMI/2020	3840-INO	Pembiayaan Laveraging Private Infrastructure Investment Project	ADB	50.000.000
3.	SLA-1270/DSMI/2020	9009-ID	Pembiayaan eksplorasi panas bumi	World Bank	100.000.000
4.	SLA-1271/DSMI/2020	TF0B0306		World Bank (CTF)	40.000.000
5.	SLA-1272/DSMI/2021	TF0B3799		World Bank (GCF)	7.500.000
6.	SLA-1292/DSMI/2022	4172-INO	Pembiayaan SIO-GFF	ADB	150.000.000

Dari keenam SLA dimaksud, penerusan pinjaman untuk pembiayaan eksplorasi panas bumi belum dilakukan penarikan disebabkan beberapa faktor yakni belum adanya kesepakatan terkait tarif jual listrik ke PT PLN (Persero) (PPA) dan terbatasnya sisa masa eksplorasi yang dimiliki pengembang PLTP.

3. PT Pertamina

Sampai dengan 31 Desember 2023, terdapat 1 (satu) kegiatan/proyek pada PT Pertamina yang masih dalam masa penarikan dan mendapat pembiayaan dari DIPA BA BUN 999.04, yaitu SLA-1242/DSMI/2011, Proyek Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Lumut Balai**.** Proyek tersebut bertujuan Meningkatkan kapasitas pasokan energi listrik sistem Sumatera. Profil penerusan pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

Kategori	Uraian
Loan Agreement	JICA IP-557 Tanggal 29 Maret 2011
SLA	1242/DSMI/2011 Tanggal 20 Oktober 2011
Jumlah Pinjaman	JPY 26.966.000.000
Tingkat Bunga Tranch I (Plafon JPY 25.834.000.000)	0,09% s.d. 0,3% per tahun
Tingkat Bunga Tranch II (Plafon JPY 1.132.000.000)	0,003% s.d. 0,01%per tahun
vClosing Date	31 Desember 2026 (amandemen ke-4, diperpanjang dari sebelumnya 25 Oktober 2023)
Jangka waktu	40 tahun termasuk masa tenggang 10 tahun sejak tanggal LA aktif

Pada tanggal 28 November 2023, telah terbit Surat Menteri Keuangan No. S-103/PMK.05/2023 tentang Perubahan PPLN No. SLA-1242/DSMI/2011 tanggal 20 Oktober 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Side Letter No. S-63/MK.05/2021 tanggal 6 Agustus 2021 antara Pemerintah RI dan PT Pertamina (Persero) (“Amandemen Keempat”). Berdasarkan amandemen tersebut, tanggal terakhir penarikan pinjaman penerusan diperpanjang dari 25 Oktober 2023 menjadi 31 Desember 2026.

E. BA BUN 999.05

1. Kebijakan Penyaluran Transfer ke Daerah TA 2023

Pada tahun 2023. terdapat kebijakan pengalihan penyaluran transfer ke Daerah dari DJPK kepada DJPb. Sesuai dengan beberapa PMK terkait kebijakan pengelolaan Dana Transfer. KPA Pengelolaan Dana Transfer adalah para Eselon II di unit teknis DJPK. sedangkan KPA Penyalur Transfer Ke Daerah adalah KPPN. yang memiliki tiga Satuan Kerja yaitu KPA Penyalur Dana Transfer Umum. KPA Penyalur Dana Transfer Khusus. dan KPA Penyalur Dana Desa. Insentif Fiskal. Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Yogyakarta. Oleh karena itu. selaku UAKPA BUN Penyalur TKD TA 2023. KPPN menyusun tiga Laporan Keuangan.

Dengan berubahnya entitas akuntansi dan pelaporan keuangan pada KPPN. maka dilakukan Likuidasi pada Satuan Kerja lama yaitu KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Selanjutnya atas hak dan kewajiban pada satker sebelumnya. dilakukan mutasi ke satker baru KPPN selaku KPA Penyalur Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Rincian Piutang sesuai dengan LK TA 2022 *Audited* adalah sebagai berikut:

a. Piutang DAK Nonfisik sebesar Rp235.474.854.444.

b. Piutang Dana Desa sebesar Rp6.663.568.678.

Selain itu. dengan beralihnya KPA Penyalur TKD seluruh jenis TKD dari DJPK ke KPPN. maka dilakukan pencatatan seluruh hak dan kewajiban atas pengelolaan TKD. Sehingga dilakukan serah terima catatan Utang dan Piutang yang dibuktikan dengan dokumen Berita Acara Serah Terima Utang dan/atau Piutang antara Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer dengan Direktur Pelaksanaan Anggaran selaku Koordinator KPA Penyalur Transfer Ke Daerah sesuai dengan BAST sebagaimana berikut:

a. BAST nomor ND-367/PK.4/2023 tanggal 10 Juli 2023 perihal Serah Terima Utang dan/atau Piutang DAK Nonfisik.

b. BAST nomor BA-3/PK.4/2023 tanggal 13 Juli 2203 perihal Serah Terima Utang dan/atau Piutang Dana Bagi Hasil (DBH).

c. BAST nomor ND-70/PK.7/2023 tanggal 12 Agustus 2023 Perihal Serah Terima Piutang Dana Keistimewaan Yogyakarta.

2. Perubahan Kebijakan Pengelolaan Hibah Kepada Daerah TA 2023

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 131 ayat (3) mengatur bahwa Hibah Kepada Daerah ditetapkan merupakan bagian dari Dana Alokasi Khusus yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Implikasi dari amanat UU HKPD tersebut, maka tata kelola hibah kepada daerah disesuaikan dengan siklus pengalokasian Transfer ke Daerah. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian peraturan pelaksanaan dan proses bisnis Hibah kepada Daerah antara lain mencakup:

a. Revisi PMK tentang Pengelolaan Hibah Kepada Daerah
b. Pengalihan Bagian Anggaran (BA) 999.02 (Pengelolaan Hibah) ke BA 999.05 (Transfer Ke Daerah).

c. Perubahan Klasifikasi anggaran.
d. Penentuan PPA dan KPA;
e. Mekanisme pelaporan dan Akuntansi

Adapun sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan dinamika yang ada Entitas Akuntansi Satuan Kerja (Satker) 985261 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Hibah Rupiah Murni) Pengelolaan Hibah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri dan Satker 985251 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Pengelolaan Hibah yang bersumber dari Hibah dan/atau Pinjaman Luar Negeri yang menjadi bagian BA BUN 999.02 (Pengelolaan Hibah) pada tahun 2023 akan digabung menjadi satu menjadi bagian dari BA BUN 999.05 Transfer Ke Daerah. Sesuai dengan notulensi rapat persiapan penyaluran Dana Hibah kepada Daerah TA 2023 melalui KPPN. penyaluran dan penatausahaan akuntansi Hibah Kepada Daerah dilakukan melalui KPPN Jakarta I. Sehingga dilakukan penggabungan Entitas Akuntansi Satker 985261 dan satker 985251 yang diampu oleh DJPK menjadi Satker yang diampu oleh KPPN Jakarta I.

Sesuai dengan PMK Nomor 47/PMK.05/2017 tetang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. terdapat pengaturan serah terima Hak dan Kewajiban melalui berita serah terima sehingga Neraca terakhir dari Satker yg dilikuidasi menjadi Nihil. Adapun Neraca Tahun 2022 satker 985251 tercatat NIHIL sehingga tidak ada Hak dan Kewajiban yang hasus diserahterimakan.

3. Penyelesaian Piutang TKD

Sampai dengan 31 Desember 2023, terdapat penyelesaian atas Piutang TKD pada Pemda dan Desa yang diselesaikan melalui Pemotongan atas Penyaluran TKD TA 2023 dan Koreksi. Penyelesaian piutang tersebut antara lain:

a. Dana Bagi Hasil sebesar Rp5.960.825.244.000
b. DAK Nonfisik sebesar Rp2.057.843.470.325
c. Insentif Fiskal sebesar Rp47.274.190.776
d. Dana Desa sebesar Rp4.474.749.401

Selain itu, terdapat Setoran yang berasal dari Tahun Anggaran Yang Lalu sehingga diakui sebagai Pendapatan Bukan Pajak yang berasal dari Setoran atas Transfer Ke Daerah dan Hibah ke Daerah yang di kembalikan ke Kas Negara dengan bukti NTPN dengan total setoran sebesar Rp71.169.690.935. Setoran tersebut merupakan penyaluran transfer TAYL yang tidak digunakan atau sisa dana yang disetorakan pada tahun anggaran berjalan

4. Penyelesaian Piutang TKD

Sampai dengan 31 Desember 2023, terdapat penyelesaian atas Utang TKD pada Pemda dan Desa yang diselesaikan melalui Penyaluran TKD Semester II TA 2023. Penyelesaian Utang tersebut adalah Utang Dana Bagi Hasil sebesar Rp46.909.526.810.000.

5. Program Percepatan Penanganan Stunting

a. DAK Fisik

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi. terdapat 3 (tiga) jenis

TKD yang diamanatkan untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi. yaitu (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. (2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. dan (3) Dana Desa.

Dukungan DAK Fisik untuk pencegahan stunting pada Tahun Anggaran 2023 terdapat pada Bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi. Selain itu, program penanggulangan stunting juga diwujudkan dengan konvergensi sumber-sumber pendanaan tersebut pada lokasi prioritasnya. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. disebutkan bahwa terdapat 249 (dua ratus empat puluh sembilan) daerah di 12 provinsi prioritas yang menjadi Lokus Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi.

DAK Fisik Penurunan Stunting

DAK Fisik berdasarkan PMK Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi terdiri atas DAK Fisik untuk Bidang Kesehatan. Bidang Air Minum. dan Bidang Sanitasi. Adapun gambaran umum atas penyaluran DAK Fisik dalam rangka penurunan stunting sebagai berikut:

Rekap Alokasi dan Realisasi Penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No.	Program/Kegiatan/Output	Jumlah Daerah	Anggaran	Realisasi Penyaluran	%
1	Kesehatan dan Keluarga Berencana yang mendukung stunting	246	2.448.984.478.000	2.189.033.985.767	89.39%
2	Sanitasi	237	1.542.187.349.000	1.524.891.647.477	98.88%
3	Air Minum	229	1.922.314.577.000	1.802.690.022.800	93.78%
Grand Total			5.913.486.404.000	5.516.615.656.044	93.29%

1) DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana

DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan kesehatan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menu dan rincian kegiatan dalam DAK Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana yang mendukung penurunan stunting antara lain:

a) Subbidang Keluarga Berencana
   (1) Menu Percepatan Penurunan Stunting
      (a) Pembangunan/Rehab/Kelengkapan Balai Penyuluhan KB
      (b) Pengadaan Kendaraan Air Antar Jemput Calon Akseptor
      (c) Pengadaan Kendaraan Roda Dua Antar Jemput Calon Akseptor
      (d) Pengadaan Kendaraan Roda Empat atau lebih Antar Jemput Calon Akseptor
   (2) Menu Sarana Prasarana Pelayanan KB
      (a) Pembangunan/Rehab/Kelengkapan Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi
      (b) Pengadaan Implan Removal Kit
      (c) Pengadaan IUD Kit

(d) Pengadaan Laparoskopi dengan kamera dan monitor
(e) Pengadaan Minilaparotomi/ Tubectomi set
(f) Pengadaan Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) Kit

b) Subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu. Bayi. dan Intervensi Stunting
(1) Menu Penguatan Kapasitas RS Mampu PONEK
(a) Alat Kesehatan untuk RS Mampu PONEK
(b) Menu Penguatan Layanan Maternal Neonatal di Puskesmas
(c) Alat kegawatdaruratan maternal neonatal
(d) USG 2 Dimensi
(2) Menu Penyediaan Alat Surveillans Gizi
Alat antropometri
(3) Menu Unit Transfusi Darah
(a) Alat UTD
(b) Sarana (Pembangunan/Renovasi)
(c) UTD Mobile

Tahun 2023, data penyaluran untuk DAK Fisik Kesehatan dan Keluarga Berencana sudah mencapai 89.39% atau dari pagu Rp2.448.9 Milyar telah tersalur Rp1.189 Milyar dengan 246 daerah lokasi yang disalurkan.

2) DAK Fisik Bidang Sanitasi

DAK Fisik Bidang Sanitasi adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dalam rangka mendukung terwujudnya layanan sanitasi yang berkelanjutan menuju target TPB bidang sanitasi serta pemenuhan SPM air limbah melalui dukungan Pemerintah Daerah dalam peningkatan cakupan layanan sanitasi. Pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan sistem sanitasi dalam Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK). Pelaksanaan DAK Fisik Subbidang Sanitasi dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S). Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). dan pembangunan tempat pengelolaan sampah reduce. reuse. resycle (TPS3R).

Untuk Tahun 2023. data penyaluran untuk DAK Fisik Bidang Sanitasi yang mendukung penanganan stunting telah mencapai 98.88% atau dari pagu Rp1.542.2 Milyar telah tersalur Rp1.524.8 Milyar dengan 237 daerah lokasi yang disalurkan.

3) DAK Fisik Bidang Air Minum

DAK Fisik Bidang Air Minum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dalam rangka mewujudkan pemenuhan 100% akses layanan air minum yang layak. aman. dan berkelanjutan sesuai target Sustainable Development Goals (SDGs) atau TPB Goal ke 6.1.1 dan untuk mewujudkan pemenuhan SPM serta untuk mendukung program prioritas nasional. dengan komitmen dan upaya pemerintah daerah. Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Air Minum berupa Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Komunal berupa Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi /

Penampungan Air Hujan (PAH) / Penangkap Mata Air (PMA). Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan berupa Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Broncaptering/Sumur Dalam Terlindungi. Pembangunan Transmisi Air Curah untuk SPAM Regional berupa Pengembangan Jaringan Distribusi Utama (JDU). Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan berupa Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/ Broncaptering. dan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan berupa Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR).

Untuk Tahun 2023. data penyaluran untuk DAK Fisik Bidang Air Minum yang mendukung penanganan stunting sudah mencapai 93.78% atau dari pagu Rp1.922.3 Milyar telah tersalur Rp1.802.7 Milyar dengan 229 daerah lokasi yang disalurkan.

b. DAK Non Fisik

Dukungan Percepatan Pencegahan Stunting melalui DAK Nonfisik Tahun 2023 meliputi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB). Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP). dan Bantuan Operasional Penyelengaaran Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD). Alokasi Untuk Dukungan Stunting Pada Tahun 2023 mengalami peningkatan signifikan antara lain karena pada dana BOK. sudah tidak terdapat menu khusus stunting. sehingga untuk tagging konvergensi menyebar ke hampir sebagian besar menu kegiatan BOK. Selain itu. pada tahun 2023. jenis DAK Nonfisik BOP PAUD kembali ditagging untuk penurunan stunting sebesar 9% dari Total Alokasi dan Realisasi BOP PAUD Reguler. Secara umum total penyaluran untuk ketiga DAK Nonfisik terkait stunting adalah sebesar 97.7% dengan realisasi penyerapan per 31 Desember 2023 berdasarkan laporan tahap I TA 2023 yang disampaikan daerah melalui aplikasi Aladin DJPK adalah sebesar 14.9%. Realisasi Penyerapan BOP PAUD berdasarkan data penggunaan yang telah dilaporkan ke BOS Salur sampai dengan tahap I untuk penyaluran tahap 2 Gelombang 2 BOP PAUD 2023. Gambaran tentang alokasi dan realisasi DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2023 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut (dalam juta rupiah):

Jenis Dana	Jumlah Daerah	Alokasi 2023	Penyaluran 2023	% Salur	Penyerapan 2023	% Serap/ Alokasi
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	545	6.748.857	6.556.208	97.1%	661.670	9.8%
Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	509	1.777.290	1.772.398	99.7%	639.180	36.0%
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP)	337	95.791	92.636	96.7%	39.299	41.0%
BOP PAUD	509	357.442	355.140	99.4%	152.939	42.8%
Total		**8.979.379**	**8.776.383**	**97.7%**	**1.493.088**	**16.6%**

data per 31 Desember 2023

1) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan upaya pemerintah pusat dalam membantu pemerintah daerah untuk mencapai target nasional di bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawab daerah. BOK adalah bantuan dana dari Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Usaha Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif sesuai SPM menuju target SDGs atau TPB. Kegiatan yang didanai BOK meliputi 3 (tiga) kelompok besar. yaitu (1) upaya kesehatan, (2) penyelenggaraan manajemen kesehatan, serta (3) upaya pendukung/penunjang untuk keberhasilannya. Upaya kesehatan wajib yang dibiayai BOK diantaranya upaya kesehatan promotif dan preventif yang meliputi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), imunisasi, perbaikan gizi, promosi kesehatan, pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan dan upaya kesehatan lainnya. Terkait kegiatan penunjang, BOK juga bisa membiayai kegiatan diantaranya meliputi kegiatan Poskesdes dan Posyandu, pengelolaan administrasi BOK, rapat koordinasi lintas sektor, pendampingan musyawarah masyarakat desa, orientasi kader kesehatan, penyuluhan kesehatan dan studi banding antar Puskesmas.

Tahun 2023. penyaluran BOK sudah mencapai 97,1% artinya hampir seluruh daerah sudah mendapatkan penyaluran BOK Stunting. dengan penyerapan per 31 Desember 2023 sebesar Rp661,6 Miliar atau sebesar 9,8% dari alokasi.

2) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)

Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian prioritas nasional yaitu sasaran Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Tujuan dari BOKB adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di daerah untuk meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan, mendukung daerah dalam pencapaian SPM kesehatan dan pencapaian akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan pemerataan pelayanan KB dan Kespro, mempercepat penurunan angka kematian ibu (AKI) dan stunting melalui penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dan penguatan pengasuhan 1000 HPK.

Sampai akhir 2023. sudah tersalurkan sebesar Rp1.772.4 Miliar atau sebesar 99,7% dari alokasi anggaran ke Kabupaten/Kota untuk DAK Non Fisik Stunting-BOKB dengan penyerapan per 31 Desember 2023 berdasarkan laporan Tahap I TA 2023 yang dilaporkan daerah melalui aplikasi Aladin yakni sebesar Rp639.18 Miliar atau 36,1% dari alokasi.

3) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP)

Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) adalah dana yang ditujukan untuk mendukung keberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dari hasil

pekarangannya sendiri dengan membantu pemerintah daerah dalam menyukseskan program pekarangan pangan lestari. Dukungan program percepatan pencegahan stunting melalui DKKP ini dilakukan dalam bentuk kegiatan pekarangan pangan lestari yang dapat meningkatkan ketersediaan aksesibilitas dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga sesuai kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta untuk jangka panjang yang dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar.

Pada tahun 2023. DKPP terkait stunting telah disalurkan sebesar 96,71% dari alokasi sebesar Rp95,79 Milyar dengan penyerapan per 31 Desember 2023 sebesar Rp39,30 Milyar.

4) BOP PAUD

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) adalah dana yang ditujukan untuk memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan secara bertahap SPM pendidikan dan mendukung pelaksanaan satu tahun pra sekolah. Dukungan program percepatan pencegahan stunting melalui BOP PAUD ini dilakukan dalam bentuk kegiatan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain dengan sub kegiatan pembiayaan diskusi perkembangan anak dan kegiatan penyelenggaraan kegiatan kesehatan gizi dan kebersihan yang meliputi sub kegiatan penyediaan alat-alat deteksi dini tumbuh kembang dan penyediaan makanan tambahan.

Pada tahun 2023. BOP terkait stunting telah disalurkan sebesar 99,4% dari alokasi sebesar Rp357,44 Milyar (9% dari alokasi BOP PAUD Reguler tahun 2023) dengan penyerapan per 31 Desember 2023 sebesar Rp152,94 Milyar.

c. Dana Desa

Dukungan Dana Desa untuk pencegahan stunting pada Tahun Anggaran 2023 dari 434 daerah penerima Dana Desa dialokasikan sebesar Rp6.190,51 miliar atau 9,10% dari pagu Dana Desa dan terealisasi sebesar Rp5,977,06 miliar atau (96,55%). Untuk mempercepat penurunan stunting, mulai tahun 2022 seluruh kab/kota menjadi lokus percepatan penurunan stunting. Pada Tahun 2023 Lokus prioritas diarahkan pada 12 Provinsi Prioritas dengan pravelensi jumlah balita stunting tertinggi dan terbanyak yaitu Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Lokasi fokus sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan dalam memprioritaskan lokasi pelaksanaan program/kegiatannya. Kriteria pemilihan lokasi fokus ialah:

1. Jumlah balita stunting
2. Prevalensi stunting
3. Tingkat kemiskinan
4. Daerah dengan komitmen dan praktik baik
5. Pemerataan lokus di tiap provinsi

Kegiatan penanganan stunting melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat desa terdiri atas:

1. Pelatihan Pengolahan makanan bergizi bagi guru PAUD dan orangtua siswa
2. Pendayagunaan Lahan Desa dalam rangka Penyediaan Makanan Sehat dan Bergizi untuk Ibu Hamil Balita dan Anak Sekolah
3. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah.

Sedangkan Kegiatan penanganan stunting melalui pembangunan desa antara lain terdiri dari:

1. Pengelolaan Advokasi Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa melalui Aplikasi Digital (e-HDW)
2. Biaya Operasional KPM Stunting
4. Pembiayaan Pelatihan Guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting
5. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Pos Pembinaan Terpadu/Penanganan Stunting
6. Tindakan Promotif dan Preventif untuk Pencegahan Stunting melalui Rumah Desa Sehat
7. Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi.

Adapun penggunaan Dana Desa dalam mendukung penurunan dan pencegahan stunting melalui tindakan promotif dan preventif seperti;

1. Pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil;
2. Penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman;
3. Pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
4. Pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi, thermometer, dan peralatan kesehatan dasar lain) dan alat peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu;
5. Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran stunting;
6. Konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran stunting;
8. Pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, pendidik pada Pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa; dan
9. Kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.dalam Musyawarah Desa.

F. BA BUN 999.08

Terdapat perbedaan antara pendapatan-LRA dan pendapatan-LO serta belanja lain-lain LRA dan beban lain-lain pada LO. dengan rincian sebagai berikut

Pendapatan-LRA	Pendapatan-LO (Operasional dan Non Operasional	Selisih
725.763.570.306,00	41.226.587.774	684.536.982.532
Belanja-LRA	Beban Lain-Lain - LO	Selisih
224.316.238.098.211,00	228.391.166.470.173	(4.074.928.371.962)

Satker MPPKP

Setelah tanggal 31 Desember 2023 terdapat pelunasan tagihan S-104 atas nama PT Bukalapak Tbk untuk pengembalian biaya pelatihan yang menjadi temuan oleh Direktorat Pemantauan dan Evaluasi MPPKP pada Lembaga GETI Incubator, Rumah Siap Kerja dan Sekolah Pintar sebesar Rp4.500.000.

Pada tanggal 10 Januari 2024 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Direktur Hukum Umum dan Keuangan MPPKP Nomor S-002/Dir-HUK/1/2024 dan S-003/Dir-HUK/1/2024 dan MPPKP memberikan sanksi. kepada Lembaga Pelatihan Kita Mahir dan ZenPro by Zenius karena terbukti melakukan pelanggaran berat. Sanksi yang diberikan yaitu:

Pencabutan penetapan Lembaga Pelatihan Kita Mahir dan ZenPro by Zenius sebagai lembaga pelatihan dalam ekosistem Program Kartu Prakerja melalui Surat Keputusan Direktur Eksekutif MPPKP Nomor 8 Tahun 2024 untuk Pencabutan Lembaga Pelatihan Kita Mahir dan Surat Keputusan Direktur Eksekutif MPPKP Nomor 9 Tahun 2024 untuk Pencabutan Lembaga Pelatihan ZenPro by Zenius ; dan Mengembalikan biaya pelatihan yang telah dibayarkan oleh MPPKP, yaitu Lembaga Pelatihan Kita Mahir harus mengembalikan biaya pelatihan sebesar Rp634.650.OOO melalui platform digital Pintar; dan Lembaga Pelatihan ZenPro by Zenius harus mengembalikan biaya pelatihan sebesar Rp4.563.980.000 melalui platform digital pintar dan b) Lembaga Pelatihan ZenPro by Zenius harus mengembalikan biaya pelatihan sebesar Rp4.563.980.000 melalui platform digital Karier.mu dan Tokopedia masing-masing sebesar Rp705.700.OOO dan Rp3.858.280.OOO. Pengembalian biaya pelatihan paling lambat harus dibayarkan pada tanggal 14 Januari 2023. Selain itu tidak ada kejadian-kejadian penting yang memberikan dampak buruk secara langsung terhadap pelayanan yang diberikan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja kepada masyarakat umum. Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja mengelola rekening di Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Pembantu Tebet dengan nomor rekening sebagai berikut.

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Status Saat ini
1	1334621057	Rekening Pemerintah Lainnya (RpL) TA 2022	Non-Aktif
2	1582052174	RKK MPP Kartu Prakerja	Aktif
3	1055845437	Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Untuk Penihilan	Aktif
4	1597032637	Rekening Pemerintah Lainnya (RpL) TA 2023	Aktif

Berdasarkan PMK No 25/PMK.05/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 200/PMK.05/2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, KPA BUN mengajukan persetujuan pembukaan rekening kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara (PKN) atas nama Dirjen Perbendaharaan atas Rekening-rekening diatas sesuai dengan Penggunaannya sebagaimana tabel diatas, Adapun persetujuan atas rekening itu sebagai berikut:

1. Rekening Penihilan Pengembalian Dana Kartu Prakerja (RPL 019 PS KARTU PRAKERJA UTK PENIHILAN) telah mendapat persetujuan Direktur PKN No S-4/PB/PB.3/2021 tanggal 2 September 2021, rekening ini digunakan sebagai Rekening Perantara sebelum dilakukannya pengembalian Dana Program ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN);
2. Rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (RKK MPP KARTU PRAKERJA) telah mendapat persetujuan dari Kepala KPPN Jakarta II No S-14/KPN.1202/2023 tanggal 3 Januari 2023, rekening ini merupakan rekening induk yang mengkonsolidasikan rekening virtual satker operasional (nomor 9891849992551000 atas nama BPG 019 Prakerja) yang digunakan untuk menampung dana pengelolaan Uang Persediaan Satker;
3. Rekening RPL Dana Kartu Prakerja Tahun 2022 telah mendapat persetujuan dari Direktur PKN No S-274/PB.3/2023 tanggal 25 Mei 2023, rekening ini digunakan sebagai Rekening Penampungan untuk Pengelolaan Dana Program Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan Surat Direktur Eksekutif MPPKP Nomor S-195/Dir-Eks/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal permintaan penutupan Rekening Induk pada Program Kartu Prakerja (RpL 2022), karena telah bersaldo RpO sejak tanggal 17 Maret 2023. RPL tahun 2022 telah ditutup oleh pihak BNI pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan perintah tertulis Direktur PKN melalui surat nomor S-274/PB.3/2023;
4. Rekening RPL Dana Kartu Prakerja Tahun 2023 telah mendapat persetujuan dari Direktur PKN No S-3/PB.3/2023 tanggal 4 Januari 2023, rekening ini digunakan sebagai Rekening Penampungan untuk Pengelolaan Dana Program Tahun Anggaran 2023.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Capaian Output

Selama periode berjalan per 31 Desember 2023 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Manajemen Pelaksana diterbitkan tanggal 30 Desember 2022 dengan nomor: SP DIPA-999.08.1.999255/2023 dan surat pengesahan DIPA dari DJA dengan nomor surat S-378/AG/2022 tanggal 30 Desember 2022. Alokasi Anggaran Manajemen Pelaksana dalam DIPA tersebut sebesar 2,67 Triliun Rupiah dengan target 595 ribu peserta. Melalui surat pemberitahuan DJA tentang perubahan alokasi dana Program Kartu Prakerja nomor: S-66/AG/2023 tanggal 1 Maret 2023, Revisi DIPA pertama berupa penambahan alokasi anggaran diterbitkan pada tanggal 20 Juli 2023 sebesar 4,37 Triliun Rupiah dengan target 1 juta peserta. Revisi DIPA kedua berupa penambahan target penerima menjadi 1.151.833 dengan Pagu tetap sebesar 4,37 Triliun Rupiah diterbitkan pada tanggal 6 November 2023. Revisi POK pada tahun 2023 telah dilakukan 9 (sembilan) kali dengan perbandingan sebagai berikut:

Sub Komp	Uraian	POK Awal	Revisi POK 9
051	Implementasi Pelatihan dan Insentif Program Kartu Prakerja	2.499.000.000.000	4.200.000.000.000
058	Pengoperasian Program Kartu Pra Kerja	68.723.910.000	49.090.170.000
059	Pengembangan Teknologi untuk Mendukung Program Kartu Prakerja	30.677.232.000	29.794.756.000
060	Pelaksanaan Kemitraan dan Pengembangan Ekosistem Program Kartu Prakerja	11.363.294.000	16.959.144.000
061	Pengembangan Komunikasi dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja	5.708.772.000	11.811.804.000
062	Pemantauan dan Ealuasi Program Kartu Prakerja	14.398.554.000	20.982.598.000
063	Pengelolaan SDM, Keuangan, dan Infrastruktur Hukum Program Kartu Prakerja	27.297.150.000	28.007.243.000
064	Pengelolaan Satker, Komite Tim Pelaksana, dan Sekretariat Program Kartu Prakerja	12.831.088.000	14.354.285.000
TOTAL		**2.670.000.000.000**	**4.371.000.000.000**

Dana Lainnya

Per 31 Desember 2023 terdapat Dana Lainnya berdasarkan PMK nomor 109 Tahun 2023 Pasal 2, dimana kriteria tersebut pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran 2023 dan pekerjaan tersebut penyelesaiannya dilanjutkan melewati batas akhir tahun anggaran 2023. Dalam hal ini, MPPKP mencadangkan dana yang dibatasi penggunaanya untuk menampung beberapa kontrak pekerjaan yang batas akhir pengajuan tagihannya sampai dengan 31 Desember 2023 dalam Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Berikut ini merupakan rincian dana pembayaran kontrak pekerjaan yang dicadangkan beserta dengan realiasi yang pembayaran yang SP2D-nya dicairkan pada tahun anggaran 2024:

No	Jenis	Nilai Pekerjaan yang Diajukan (Rp)	Realisasi Nilai Pekerjaan yang Dibayarkan (Rp)	Realisasi Nilai Pekerjaan yang Terkoreksi (Rp)
1	Pembayaran KAP Tasnim, Ferdiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan dan Rekan termin 12	153.135.600	153.135.600	0
2	Pembayaran PT Paragon Pratama Teknologi	199.022.445	199.022.445	0
3	Pembayaran PT Telekomunikasi Indonesia Tbk termin 3	50.394.000	50.394.000	0
4	Pembayaran PT VADS Indonesia termin 12	2.964.521.052	2.296.441.062	668.079.990
5	Pembayaran PT Sosial Teknologi Indonesia termin 12	1.760.152.765	823.939.983	936.212.782
6	Pembayaran PT MNC Land Tbk termin 6	618.547.500	306.193.500	312.354.000
TOTAL		**5.745.773.362**	**3.829.126.590**	**1.916.646.772**

Satker Dit. Tanaman Pangan (CBN)

- Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan BA.999.08.969380.KP merupakan satker inaktif karena tidak lagi mendapat alokasi anggaran sejak tahun 2013.
- PT. SHS melalui Surat No. 744/DIR/SHS.01/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 Menjadwalkan Ulang (Rescheduling) Penyelesaian Kewajiban PT. Sang Hyang Seri atas LHP BPK RI No. 25/LHP/XVII/06/2013 berupa uang muka penyegaran benih CBN pada PT Sang Hyang Seri (Persero) yang harus disetorkan ke Kas Negara senilai Rp. 4.811.607.957,-.

Satker Layanan Pos Universal. Kemenkominfo

a. Bantuan Operasional Layanan Pos Universal mulai dianggarkan melalui BA BUN 999.08 pada tahun 2013 melalui mekanisme SABA. Mulai tahun 2014. kegiatan tersebut dianggarkan melalui DIPA BA BUN 999.08. Pada Tahun Anggaran 2023. program pengelolaan Subsidi Operasional LPU dianggarkan melalui DIPA Nomor SP DIPA-999.08.1.984526/2023 tanggal 30 Desember 2022 Bagian Anggaran 999.08 Pengelolaan Belanja Lain-Lain dengan kode satker 984526.

b. Bantuan Operasional LPU digunakan untuk membiayai Kantor LPU sesuai ketentuan yang terdapat pada Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 486 Tahun 2023 tentang Pedoman Perhitungan dan Pengawasan serta Pembayaran Subsidi Operasional Layanan Pos Universal. Dana Bantuan Operasional LPU diberikan berdasarkan metode pelaporan realisasi pendapatan dan biaya penyelenggaraan Layanan Pos Universal sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika dimaksud.

c. Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 503 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 147 Tahun 2023 tentang Penetapan Kantor Layanan Pos Universal dalam Rangka Penyelenggaraan Layanan Pos Universal Tahun 2023. jumlah Kantor LPU pada tahun 2023 ini ditetapkan sebanyak 2.460 kantor.

d. Capaian Capaian output kegiatan Pengelolaan Bantuan Operasional Layanan Pos Universal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 telah tercapai sebanyak 2.460 KPC LPU atau mencapai 100 persen dari target output yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 503 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 147 Tahun 2023 tentang Penetapan Kantor Layanan Pos Universal dalam Rangka Penyelenggaraan Layanan Pos Universal Tahun 2023.

Satker BPKPBPB Batam

a. Rencana Kerja dan Anggaran BP Batam (984423) TA 2023 Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan:

   Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam BA BUN Kode Satker 984423 TA 2023 mendapat persetujuan Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan pada tanggal 30 Desember 2022 melalui Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bendahara IJmum Negara (BUN) Nomor: SP DIPA- 999.08.1.984423/2023 dengan nilai pagu sebesar Rp246.442.623.000.

   Selama periode Tahun 2023 DIPA BP Batam (984423) mengalami satu kali Revisi DIPA dengan tanggal Revisi 30 November 2023. revisi tersebut tidak mengurangi atau merupak nilai DIPA

b. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK:

   Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam pelaksanaan pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2022 telah menyampaikan Laporan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Belanja Lain- Lain (999.08) Tahun 2022 pada Unit Akuntansi Kuasa

Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BA999.08.984423). melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 23/LHP/XVIII/05/2023 tanggal 10 Mei 2023. Tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut adalah telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara Tahun 2023 terhadap biaya kelebihan pembayaran pekerjaan tersebut.

Satker Pengelola Dana Cadangan Beras Pemerintah pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran III

Pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.02/2021, mengatur bahwa Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran III, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai KPA BUN.
Pada Tahun 2023 telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahap Pertama yang mengatur:

1. Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional sebagai KPA BUN Dana Penyelenggaraan CPP.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 657) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.02/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 867), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak mulai diundangkan.
3. Kekurangan pembayaran kepada Perum BULOG sebagai akibat penggunaan cadangan beras pemerintah sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2023 dapat ditagihkan kepada KPA BUN pada Tahun Anggaran 2023 dalam hal ini KPA BUN Dana Penyelenggaraan CPP.

Terkait rekomendasi temuan BPK pada Laporan Keuangan TA 2022 Audited yaitu Utang Jangka Pendek Dana Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2021 Sebesar Rp491,98 Miliar Belum Diselesaikan, dapat disampaikan bahwa:

1. Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan (999.08.999979) tidak memiliki alokasi DIPA untuk Tahun Anggaran 2023.
2. Dengan tidak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.02/2021 maka kewenangan Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran III, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan sebagai KPA BUN sudah tidak ada.
3. Kekurangan pembayaran kepada Perum BULOG sebagai akibat penggunaan cadangan beras pemerintah sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2023 dapat

ditagihkan kepada KPA BUN pada Tahun Anggaran 2023 dalam hal ini KPA BUN Dana Penyelenggaraan CPP termasuk Utang Jangka Pendek Dana Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2021 Sebesar Rp491,98 Miliar Yang Belum Diselesaikan.

4. Sebagai tindak lanjut Pasal 22 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahap Pertama, pada tanggal 27 September 2023 telah dilakukan pengalihan utang pihak ketiga dari satuan kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan (999.08.999979) ke satuan kerja Satuan Kerja Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan (999801) sebesar Rp3.101.577.212.413 (termasuk Utang Jangka Pendek Dana Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2021 Sebesar Rp491,98 Miliar Yang Belum Diselesaikan) sesuai BAST nomor BA-508/KPN.1207/2023 tanggal 27 September 2023 (terlampir) dengan rincian sebagai berikut:
   a. Sebesar Rp109.769.843.377 karena pengajuan dari Perum BULOG (sesuai surat dari Kementerian Perdagangan menggunakan reviu dari BPKP) sebesar Rp1.249.849.252.952 lebih rendah dari pencatatan utang KPSH 2021 sesuai HPB Audited 2021 oleh BPK sebesar Rp1.359.619.096.329.
   b. Sebesar Rp382.216.934.728 karena pengajuan dari Perum BULOG (sesuai dengan surat Kementerian Sosial menggunakan reviu dari BPKP) sebesar Rp3.088.745.280.000 lebih rendah dari pencatatan utang BB PPKM 2021(Beras BB PPKM dan Biaya Pengarungan dan distribusi) sesuai audit HPB 2021 oleh BPK sebesar Rp3.470.962.214.728.
   c. Sebesar Rp2.609.590.434.308 karena kekurangan penerimaan penggantian CBP Tahun 2022 (sesuai perhitungan selisih antara HPB dengan harga penjualan beras untuk kegiatan KPSH dan penggantian CBP untuk penanggulangan keadaan darurat bencana tahun 2022 oleh tim auditor BPK) dengan rincian KPSH sebesar Rp2.582.541.468.316 dan darurat bencana sebesar Rp27.048.965.992.

Satker Pengelola Ongkos Angkut Beras Papua

Kanwil DJPb Provinsi Papua telah menindaklanjuti Temuan dan Rekomendasi Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BUN Tahun 2017 dan 2018 sebagaimana terlampir.

Pada tahun 2023 terjadi perubahan operator dan perubahan manajemen kepengurusan OAB pada pejabat perbendaharaan sebagai berikut

1. Perubahan operator distribusi beras ASN distrik pedalaman Provinsi Papua yang sebelumnya PD Irian Bhakti menjadi PT Pos Indonesia selaku pemenang tender pengadaan distribusi (pemindahan dan pengiriman) beras pegawai negeri sipil (PNS) distrik pedalaman Provinsi Papua Tahun 2023 sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan selaku Kepala UKPBJ Nomor ND-296/SJ.7/2023 hal Usulan Penetapan Pemenang Tender Pengadaan Distribusi (Pemindahan dan Pengiriman) Beras Pegawai Negeri Sipil (PNS) Distrik Pedalaman Provinsi Papua Tahun 2023.
2. Sejalan dengan pergantian Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua terjadi Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan ongkos angkut beras ASN distrik pedalaman Provinsi Papua TA 2023 yang sebelumnya Burhani AS menjadi Moudy Hermawan sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Nomor KEP-59/WPB.34/2023 Tentang Penunjukan Kuasa Penggunaanggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen,Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara

Pengeluaran Dan Staf Pengelola Keuangan Kegiatan Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023.

3. Terdapat addendum kontrak sebanyak dua kali dengan nomor ADDENDUM-01/OAB/WPB.34/2023 tanggal 4 September 2023 dan ADDENDUM-02/OAB/WPB.34/2023 tanggal 24 Oktober 2023. Addendum kontrak yang pertama tidak mengubah nilai total kontrak hanya mengurangi nilai tagihan termin I dan dipindahkan ke nilai tagihan termin IV serta memundurkan jadwal pembayaran termin II. Addendum kontrak kedua mengubah nilai total kontrak yang sebelumnya Rp127.974.333.840 menjadi Rp114.039.790.373. Hal tersebut dikarenakan kontrak awal terlambat ditandatangani yang mengakibatkan beberapa pemerintah daerah yang diakomodasi OAB telah mengambil sendiri jatah berasnya dan terdapat beberapa pegawai ASN di beberapa pemda yang seharusnya jatah berasnya diangkut menggunakan moda darat/laut/udara menjadi diambil sendiri sehingga harga angkut menjadi lebih murah.
4. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penyaluran beras PNS distrik pedalaman Provinsi Papua tahun 2023 sampai dengan periode saat ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Rekap penyaluran beras dalam kilogram per 31 Desember 2023

Volume Kontrak	SO Bulog Terbit	Beras Didistribusi
15.304.310	15.213.390	15.213.390

   b. Beras yang telah didistribusikan terhadap SO Bulog yang diterbitkan adalah sebesar 100%.
   c. Beras yang telah didistribusikan terhadap volume kontrak adalah sebesar 99,41%
   d. Terdapat jatah beras yang diambil sendiri oleh pemda yaitu JanMar (Biak, Yapen, Mimika, dan Merauke), Jan-Feb (Supiori).
   e. Kabupaten Waropen belum menyelesaikan kewajiban pembayaran beras bulan Desember 2023 kepada Perum Bulog, sehingga SO Bulog bulan bersangkutan tidak dapat terbit.

Berdasarkan BAPHA – Audit Tujuan Tertentu atas Kegiatan Penyaluran dan Pembayaran Tagihan Ongkos Angkut Beras ASN (BA BUN 999.08) Tahun 2023 pada Kanwil DJPb Provinsi Papua atas audit yang dilaksanakan pada tanggal 12- 19 Desember 2023 ditemukan hal-hal sebagai berikut:

a. Pelaksanaan distribusi pengangkutan beras tidak dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) selaku Penyedia melainkan oleh Pihak Lain di Luar Perjanjian yaitu PT. Yasa Artha Trimanunggal.
b. PT. Pos Logistik Indonesia sebagai anak perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) melakukan perikatan dengan PT. Yasa Artha Trimanunggal untuk melaksanakan distribusi pengangkutan beras ASN Tahun 2023, meliputi seluruh kabupaten di Papua (seluruh titik serah) dengan volume beras sesuai kontrak awal sebesar 15.299.640 kg dan nilai kontrak sebesar Rp98.009.493.840.
c. Berkenaan dengan hasil audit tersebut di atas Inspektorat III merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
   1) Mengenakan sanksi terhadap Penyedia (PT. Pos Indonesia (Persero)) berupa: i) Pemutusan kontrak; atau ii) Membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga di dalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor.
   2) Mengusulkan PT Pos Indonesia (Persero) ke dalam daftar hitam (blacklist) jika sanksi yang dikenakan sebagaimana poin a adalah pemutusan kontrak.
   3) Meminta PT Pos Indonesia (Persero) membuat pernyataan akan menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pihak-pihak terkait dan bertanggungjawab atas segala dampak

hukum yang mungkin timbul di kemudian hari yang disebabkan oleh pelanggaran perjanjian oleh PT Pos Indonesia (Persero).

Berdasarkan hasil audit tujuan tertentu atas kegiatan penyaluran dan pembayaran tagihan Ongkos Angkut Beras ASN (BA BUN 999.08) Pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Tahun 2023 dan rekomendasi dari itjen, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua telah menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut.

d. PPK telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak (Surat Nomor: S-07/PPK/OAB/WPB.34/2023 tanggal 19 Desember 2023).
e. PPK memutus kontrak dengan pertimbangan PT Pos Indonesia (Persero) selaku penyedia telah melakukan Subkontrak atas pekerjaan yang dikerjakan kepada pihak lain (Surat Nomor: S-08/PPK/OAB/WPB.34/2023 tanggal 27 Desember 2023).
f. PPK telah mengusulkan PT. Pos Indonesia (Persero) kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kedalam daftar hitam/blacklist (Surat Nomor: S-11/PPK/OAB/WPB.34/2023 tanggal 29 Desember 2023).
g. Sebagai Konsekuensi dari pemutusan kontrak maka PPK telah mengajukan Pencairan Jaminan Pelaksanaan/Bank Garansi ke PT. Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Jayapura dengan menebitkan Surat Pernyataan Wanprestasi (certificate of default) tanggal 29 Desember 2023 dan telah disetor oleh Bank Mandiri ke rekening kas negara.

Satker Pengelola Ongkos Angkut Beras Provinsi Papua Barat

Menunjuk Surat Keputusan KPA Satker Ongkos Angkut Beras Provinsi Papua Barat Nomor KEP-006/WPB.33/999976/2023 tanggal 6 Oktober 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat Nomor KEP-001/WPB.33/999976/2023 Tentang Pejabat Perbendaharaan. Tim Pengelola Keuangan. dan Petugas Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Satker Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat Untuk Kegiatan Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat (BA 999.08.999976) Tahun Anggaran 2023. terdapat perubahan pengelola keuangan Satker Ongkos Angkut Beras Provinsi Papua Barat selama tahun 2023 sebagai berikut:

No.	Pejabat/Pegawai Lama	Pejabat/Pegawai Baru	Jabatan	Periode
1.	Agung Mulyono NIP 197505231996021001	Ery Setyawan NIP 198503162007101001	Koordinator Tim SAI	KEP-006/WPB.33/999976/2023
2.	Susanto NIP 197205161999031002	Bakhtiar Efendy Labib NIP 198404112006021003	PPSPM	KEP-006/WPB.33/999976/2023
3.	Ery Setyawan NIP 198503162007101001	Wan Aznawi Nst NIP 198308142003121004	Ketua Tim SAI	KEP-006/WPB.33/999976/2023

Pada tahun 2023 dan sebagaimana telah dilaksanakan di tahun sebelumnya. dalam rangka memperbaiki pengawasan. pengendalian. dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan OAB. operator tidak lagi diberikan uang muka kerja sebagaimana diberikan di tahun-tahun sebelumnya. Selain itu. setiap permohonan tagihan yang disampaikan oleh Operator. PPK tetap melakukan pengujian secara formil atas lampiran dokumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 10/PMK.02/2023. yang meliputi Tanda bukti Pengiriman (Delivery Order) beras. Rekapitulasi Berita Acara Penyaluran Beras. dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Guna meningkatkan pengendalian dan kebenaran tagihan yang diajukan oleh Operator. untuk tahun 2023 setiap lampiran tagihan tetap ditambahkan dengan BAPB (Berita Acara Penyerahan Beras) yang merupakan berita acara yang ditandatangani operator. pihak pengangkut beras. dan pejabat/pegawai (PNS) yang ditunjuk masing-masing distrik sebagai penerima beras. Adapun kewajiban melampirkan BAPB tersebut diatur dalam kontrak OAB tahun 2023 dan Peraturan Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Papua Barat Nomor PER-01/WPB.33/999976/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Ongkos Angkut Beras Pegawai Aparatur Sipil Negara Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. yang antara lain menegaskan bahwa terkait dengan pencairan dana. operator harus pula menyampaikan BAPB masing-masing distrik selain persyaratan-persyaratan yang sudah ada di peraturan sebelumnya. Selain untuk penyaluran ke distrik pedalaman. BAPB juga menjadi persyaratan pada pengambilan dalam kota. BAPB untuk pengambilan dalam kota pada Gudang Operator ditandatangani oleh operator dan pejabat/ pegawai (PNS) yang ditunjuk masing-masing distrik sebagai penerima beras. Untuk pengajuan tagihan dan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian kegiatan OAB. operator tetap diwajibkan untuk menyampaikan tagihan lengkap secara hardcopy kepada Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat. meskipun transportasi udara/darat masih terdapat kendala di beberapa lokasi di Provinsi Papua Barat.

Selanjutnya dalam rangka untuk menjamin pelaksanaan kegiatan OAB ASN Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya tahun 2023 sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan guna menindaklanjuti rekomendasi BPK RI. Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat pada bulan Januari sampai dengan Desember 2023 telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan OAB. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan di BPKAD/DPPKAD. OPD. Kantor Cabang Perum Bulog. dan Kantor Cabang Irian Bhakti (Operator) di beberapa Kabupaten lingkup Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Berkenaan dengan kegiatan tersebut juga telah dilaksanakan Audit Penyaluran Beras dan Pembayaran Tagihan OAB PNS Tahun 2022 dan 2023 pada Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan mulai tanggal 9 s.d. 22 November 2023. di bawah tanggung jawab Inspektur III.

Adapun hasil temuan atas audit tersebut secara garis besar mempunyai isu utama sebagaimana berikut:

Pelaksanaan Pengangkutan Beras ASN Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat oleh PT Pos Indonesia yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian dikarenakan pelaksanaannya dilakukan oleh pihak lain (PT Yasa Artha Trimanunggal) dengan Potensi Kerugian Negara sebesar Rp5.289.122.680. Atas hal tersebut. Inspektorat Jenderal merekomendasikan untuk:

1) Memberikan sanksi pemutusan kontrak dengan memperhitungkan prestasi pekerjaan yang telah dilakukan s.d. tanggal pemutusan kontrak.
2) Memasukkan PT Pos Indonesia ke dalam daftar hitam (*blacklist*).

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat selaku Satker Pengelola Ongkos Angkut Beras menindaklanjuti dan menanggapi temuan Itjen tersebut sesuai dengan waktu penyelesaian yang ditentukan. Dapat diinformasikan bahwa salah satu tanggapan dan tindak lanjut temuan adalah Kanwil DJPb Papua Barat telah bersurat kepada PT Pos Indonesia melalui surat nomor S-017/WPB.33/999976/2023 tanggal 22 Desember 2023 perihal Pemutusan

Kontrak Pekerjaan kepada Direktur Utama PT Pos Indonesia. Selain itu. Kanwil DJPb Papua Barat telah bersurat ke LKPP melalui nomor S-143/WPB.33/2024 tanggal 25 Januari 2024 dalam permintaan rekomendasi/pendapat hukum terkait tindak lanjut yang seharusnya dilakukan KPA OAB atas rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk pengenaan sanksi daftar hitam (*blacklist*) sebagai penyedia barang/jasa pemerintah kepada PT Pos Indonesia (Persero).

Pada tahun 2023. penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI atas Laporan Keuangan tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya juga terus dilakukan. Terdapat progress tindak lanjut rekomendasi BPK-RI yang masih dalam proses yaitu rekomendasi BPK-RI atas Laporan Keuangan Tahun 2017 dan Tahun 2018. dimana terdapat perbedaan pencatatan jumlah kuantum (kilogram) beras yang diantar antara pihak Bulog dan pihak PD. Irian Bhakti selaku operator. Untuk menyelesaikan rekomendasi BPK tersebut. telah dilakukan Rekonsiliasi tiga pihak antara Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat. Bulog dan PD. Irian Bhakti. Oleh karena itu. kami lampirkan laporan progres tindak lanjut rekomendasi BPK dimaksud beserta dokumen pendukung yang menjadi bukti tindak lanjut atau penyelesaian rekomendasi sebagaimana terlampir.

Satker Dana Kompensasi

Pelaksanaan pembayaran kompensasi akan dilakukan dengan memperhatikan kelengkapan administratif pencairan dan dengan mempertimbangkan ketersediaan kas Pemerintah.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S-264/MK.02/2023 tanggal 31 Maret 2023 perihal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo. Tbk akibat Penetapan Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar Tahun 2022 dan S-265/MK.02/2023 tanggal 31 Maret 2023 perihal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Penetapan Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Bensin (Gasoline) RON 90 Tahun 2022. telah dilaksanakan pembayaran atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo. Tbk akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM Tahun 2022 sebesar Rp49.285.038.738.380.00 dalam 3 (tiga) tahap. sebagai berikut:

Keterangan	Kurang Bayar 2022	Realisasi Pembayaran Kekurangan Tahun 2022				Sisa Kurang Bayar 2022
		Tahap I (2 Mei 2023)	Tahap II (24 Mei 2023)	Tahap III (9 Juni 2023)	Jumlah	
Kompensasi kepada PT PERTAMINA	48.997.444.476.003	24.498.722.238.001	12.249.361.119.001	12.249.361.119.001	48.997.444.476.003	-
JBT Minyak Solar	35.679.851.956.254	24.498.722.238.001	11.181.129.718.253	-	35.679.851.956.254	-
JBKP Premium	13.317.592.519.749	-	1.068.231.400.748	12.249.361.119.001	13.317.592.519.749	-
Kompensasi kepada PT AKR	287.594.262.377	287.594.262.377	-	-	287.594.262.377	-
Total Kompensasi BBM	**49.285.038.738.380**	**24.786.316.500.378**	**12.249.361.119.001**	**12.249.361.119.001**	**49.285.038.738.380**	**-**

Selanjutnya. dalam Pemeriksaan atas Laporan Keuangan UAP BUN 999.08 Belanja Lainnya TA 2022 terdapat usulan jurnal koreksi dari BPK RI. sehingga jumlah Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo. Tbk akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM Tahun 2022 menjadi sebesar Rp49.428.187.379.882.00. dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Kurang Bayar berdasarkan Surat Menteri Keuangan	Kurang Bayar berdasarkan Pemeriksaan BPK RI	Selisih (koreksi Jurnal)
Kompensasi kepada PT PERTAMINA	48.997.444.476.003	49.140.754.458.912	(143.309.982.909)
JBT Minyak Solar	35.679.851.956.254	35.823.174.618.999	(143.322.662.745)
JBKP Premium	13.317.592.519.749	13.317.579.839.913	12.679.836
Kompensasi kepada PT AKR	287.594.262.377	287.432.920.970	161.341.407
Total Kompensasi BBM	**49.285.038.738.380**	**49.428.187.379.882**	**(143.148.641.502)**

Apabila Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo. Tbk akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM Tahun 2022 berdasarkan pemeriksaan BPK RI sebesar Rp49.428.187.379.882 dibandingkan dengan realisasi pembayaran sebesar Rp49.285.038.738.380. maka masih terdapat kekurangan pembayaran atas kompensasi BBM Tahun 2022 sebesar Rp143.148.641.502 dengan rincian:

a. Kekurangan Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (HJE BBM) JBT Minyak Solar Tahun 2022 sebesar Rp143.322.662.745. yang merupakan koreksi penambahan utang berdasarkan BA Hasil Pemeriksaan BPK RI.

b. Kelebihan Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM JBKP Pertalite Tahun 2022 sebesar Rp12.679.836. yang merupakan yang merupakan koreksi pengurangan utang berdasarkan BA Hasil Pemeriksaan BPK RI.

c. Kelebihan Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo. Tbk. akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Tahun 2022 sebesar Rp161.341.407. yang merupakan yang merupakan koreksi pengurangan utang berdasarkan BA Hasil Pemeriksaan BPK RI.

Keterangan	Utang per 31/12/2022 sesuai Asersi	Utang 31/12/2022 sesuai BPK	Pembayaran (di Tahun 2023 sesuai Asersi)	Sisa Utang
Kompensasi kepada PT PERTAMINA	48.997.444.476.003	49.140.754.458.912	48.997.444.476.003	143.309.982.909
BBM Solar 2022	35.679.851.956.254	35.823.174.618.999	35.679.851.956.254	143.322.662.745
BBM Pertalite 2022	13.317.592.519.749	13.317.579.839.913	13.317.592.519.749	(12.679.836)
Kompensasi kepada PT AKR	287.594.262.377	287.432.920.970	287.594.262.377	(161.341.407)
BBM Solar 2022	287.594.262.377	287.432.920.970	287.594.262.377	(161.341.407)
Total Kompensasi BBM	**49.285.038.738.380**	**49.428.187.379.882**	**49.285.038.738.380**	**143.148.641.502**

Terhadap sisa utang sebesar Rp143.148.641.502 dimaksud, telah diproses penyelesaian pembayarannya bersamaan dengan penyelesaian pembayaran dana kompensasi BBM periode Triwulan I Tahun 2023.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor: S-953/MK.02/2023 tanggal 19 November 2023 perihal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Penetapan Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Bensin (Gasoline) RON 90 Periode Triwulan II Tahun 2023 dan Penetapan Final Kompensasi Tahun 2021, diantaranya ditetapkan Nilai final kekurangan penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat penetapan harga jual JBT Minyak Solar dan JBKP Bensin (Gasoline) RON 90 tahun 2021 dengan jumlah koreksi sebesar Rp569.203.082.685, dengan rincian:

1. Kelebihan pembayaran dana kompensasi JBT Minyak Solar sebesar Rp7.738.686.904.
2. Kekurangan pembayaran dana kompensasi JBKP Premium sebesar Rp574.993.620.400.
3. Kekurangan pembayaran dana kompensasi JBKP Eks Pertalite sebesar Rp1.948.149.189.

Dalam Surat Direktur Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan nomor: PE.12.03/S-143/D404/1/2024 tanggal 7 Februari 2024 perihal Notisi atas Reviu Perhitungan Dana Kompensasi BBM Tahun 2023, disampaikan hasil reviu sebagai berikut:

Keterangan	Hasil Reviu dalam Notisi BPKP 2023
Kompensasi kepada PT PERTAMINA	126.263.272.204.708
JBT Minyak Solar	74.185.925.661.764
JBKP Pertalite	52.077.346.542.944
Kompensasi kepada PT AKR	**630.943.402.145**
Total Kompensasi BBM	**126.894.215.606.853**

Selanjutnya, dalam dalam Catatan Hasil Reviu dari Inspektorat Jenderal dinyatakan terdapat koreksi overstated atas perhitungan kompesasi JBT Minyak Solar pada PT Pertamina Patra Niaga sebesar Rp15.048.705.539. Mengacu hasil reviu tersebut, maka perhitungan beban dan utang kompensasi BBM tahun 2023 menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Hasil Reviu BPKP + koreksi Itjen	Realisasi Belanja	Utang per 31 Des 2023
Kompensasi kepada PT PERTAMINA	**126,248,223,499,169**	**82,727,866,313,682**	**43,520,357,185,487**
JBT Minyak Solar	74,170,876,956,225	48,815,436,036,593	25,355,440,919,632
JBKP Pertalite	52,077,346,542,944	33,912,430,277,089	18,164,916,265,855
Kompensasi kepada PT AKR	**630,943,402,145**	**398,364,829,388**	**232,578,572,757**
Total Kompensasi BBM	**126,879,166,901,314**	**83,126,231,143,070**	**43,752,935,758,244**

Realisasi Pendapatan hingga periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp675.985.479.244 merupakan koreksi untuk pengakuan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima atas kelebihan pembayaran berdasarkan surat Direktur Utama PT PLN (Persero) nomor 30834/KEU.01.07/F01000000/2023 tanggal 7 Juni 2023.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S-292/MK.02/2022 tanggal 2 April 2022 perihal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT PLN (Persero) akibat Penetapan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2021, telah dilaksanakan pembayaran atas Kekurangan Penerimaan PT PLN (Persero) akibat kebijakan penetapan tarif tenaga listrik tahun 2021 sebesar Rp24.594.425.188.000 pada tahun 2022.

Selanjutnya dalam surat Direktur Utama PT PLN (Persero) nomor 30834/KEU.01.07/F01000000/2023 tanggal 7 Juni 2023 hal Penyelesaian Kelebihan Bayar Kompensasi Tahun 2021 dan Pembayaran Sisa Kompensasi Tahun 2022 disampaikan bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Kepatuhan atas Perhitungan Penyesuaian Tarif tenaga Listrik dan Dana Kompensasi Tarif Tenaga Listrik Tahun 2021 pada PT PLN (Persero) dan Instansi Terkait nomor 4/S/IX-XX/01/2023 tanggal 17 Januari 2023, hasil BPK adalah sebesar Rp23.918.439.708.756, sehingga terdapat kelebihan pembayaran kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp675.985.479.244.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.2/2022, atas kelebihan pembayaran kompensasi tarif tenaga listrik tahun 2021 tersebut telah diperhitungkan dengan pembayaran kompensasi listrik untuk kekurangan pembayaran kompensasi listrik tahun 2022 tahap ketiga di periode Triwulan III tahun 2023, sehingga dengan demikian tidak terdapat

piutang kompensasi listrik PT PLN (Persero) akibat kelebihan pembayaran dana kompensasi tarif tenaga listrik tahun 2021.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.2/2022, dana kompensasi TA 2023 dalam LKBUN Dana Kompensasi TA 2023 unaudited dicatat berdasarkan Asersi Manajemen KPA BUN Dana Kompensasi yang mengacu pada hasil reviu BPKP atas perhitungan kekurangan penerimaan badan usaha akibat penetapan HJE BBM dan tarif tenaga listrik tahun 2023.

Dengan mempertimbangkan proses penyusunan LKBUN yang dilakukan melalui reviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2021, maka nilai utang kompensasi energi TA 2023 dikoreksi menjadi sebesar Rp61.588.132.989.258 (BBM sebesar Rp43.752.935.758.244 dan Listrik sebesar Rp17.835.197.231.014).

Terdapat koreksi Beban dan Utang dana kompensasi BBM hasil pemeriksaan lembaga pemeriksa yang berwenang yang terdiri dari JBT Solar PT PPN sebesar Rp3.553.645.877, JBKP Pertalite PT PPN sebesar Rp1.097.944.133 dan JBT Solar PT AKR sebesar Rp62.285.363 sehingga Utang kepada Pihak Ketiga pada Satker Pengguna Anggaran Dana Kompensasi sebesar Rp61.583.419.113.884

Satker ICSID (International Center For Settlement of Invesment Dispute) pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Temuan Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap LK BA 999.08 sampai dengan 30 Juni 2023 adalah berdasarkan LHP BPK Nomor: 78/LHP/XV/05/2014 tanggal 26 Mei 2014 terdapat temuan Pembayaran Honorarium Tim Pendukung Penanganan Permohonan Arbitrase Melebihi Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013 Sebesar Rp2.271.660.000 dan Pembayaran Honorarium sekitar Rp1,78 miliar Belum Sepenuhnya Didukung Pelaksanaan Kegiatan. Atas temuan tersebut telah dilakukan pembahasan dengan Tim BPK pada tanggal 22 Juni 2022 dengan data dukung Nota Dinas Inspektur VI Inspektorat Jenderal Kemenkeu Nomor ND-391/IJ.7/2021 tanggal 28 Agustus 2021 hal Tanggapan atas Permintaan Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK atas Temuan ICSID dan Surat Inspektur VI Inspektorat Jenderal Nomor S-6/IJ/2015 tanggal 16 Januari 2015 hal Tanggapan atas Permintaan Progress Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BA BUN Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun 2013.

Satker Distribusi dan Cadangan Pangan

Pada Tahun 2023 telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyediaan. Pencairan. Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahap Pertama diantaranya mengatur: Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan. Badan Pangan Nasional sebagai KPA BUN Dana Penyelenggaraan CPP. sehingga pengelolaan Cadangan Pangan permerintah yang semula pada KPA Satker Pengelola Dana Cadangan Pangan Pemerintah pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran dialihkan ke KPA Satker Distribusi dan Cadangan Pangan.

Pada Rabu. 27 September 2023 telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-508/KPN.1207/2023 yang diserahkan dari KPA BUN Penyalur Dana Cadangan Pangan Pemerintah kepada Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan selaku KPA BUN Dana Cadangan Pangan Pemerintah. Berdasarkan BAST tersebut. menerima kewajiban atas utang kepada pihak ketiga sebesar Rp3.101.577.212.413 dengan rincian Penyelesaian Tunggakan KPSH Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2021-2022 sebesar Rp 2.692.311.313.000. Biaya Pengarungan dan Distribusi Bantuan Beras Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Tahun 2021 sebesar Rp382.216.934.728.000. dan Sisa Tunggakan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Bencana Alam 2022 sebesar Rp27.048.965.992.000. Penetapan nilai tersebut berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perhitungan Harga Pembelian Beras Cadangan Pangan Pemerintah Tahun Anggaran 2022 Pada Perum Bulog. Satuan kuatum ketiga kegiatan tersebut adalah paket. Hal tersebut sesuai dengan hutang yang sudah disepakati oleh Kementerian Keuangan sebagai hutang negara terhadap Perum BULOG.

DIPA Satker Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan terbit tanggal 24 November 2023 dengan alokasi dana sesuai yang diusulkan yaitu Rp3.101.577.214.000. Pada 6 Desember 2023 dilakukan pembayaran untuk Tunggakan KPSH CPP 2021-2022. Tunggakan BB PPKM 2021. dan Tunggakan CPP untuk Bencana Alam 2022.

Pada 22 Desember 2023 diusulkan tambahan anggaran untuk DIPA CPP 2023 sebesar Rp9.773.567.395.000 untuk pembayaran atas penugasan Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Tahap I dan Penyaluran CPP untuk SPHP Tw 1-3 TA 2023. Pada 29 Desember 2023 terbit DIPA Revisi 1 dan dilakukan pembayaran kepada Perum BULOG untuk Bantuan Pangan Tahap I dan Penyaluran CPP untuk SPHP Tw 1-3 TA 2023 sebesar Rp9.773.567.393.008.

G. CAPAIAN OUTPUT BELANJA BUN

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur bahwa:

a. *Pasal 9 huruf (g):*
Penyusunan dan penyajian LKKL adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara. termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran.

Pasal 30 ayat (2):
Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja. juga menjelaskan prestasi kerja setiap kementerian negara/lembaga.

Selanjutnya. dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah diatur bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. termasuk kementerian negara/lembaga.

Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai entitas pelaporan hakikatnya tidak menyusun laporan kinerja sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dalam rangka pelaksanaan APBN. namun pada entitas BUN terdapat Belanja yang pada prinsipnya dapat menghasilkan *out put* dari belanja tersebut walaupun pada beberapa belanja tidak dapat diukur secara ideal seperti pada Kementerian/Lembaga yang menghasilkan *out put* berupa barang dan

jasa. Pada entitas BUN beberapa belanja diukur pada target realisasi saja. misalnya belanja bunga utang. belanja hibah dan belanja tansfer ke daerah. Beberapa volume keluarannya juga belum ideal misalnya layanan. dokumen dan laporan.

Capaian *output* belanja BUN yang diungkapkan pada Catatan Penting Lainnya LRA ini diambil dari Aplikasi SMART BUN. Beberapa volume keluaran disesuaikan/diberi penjelasan sesuai dengan *output*-riilnya. Capaian *output* Belanja BUN pada seluruh entitas pelaporan pada masing-masing Bagian Anggaran BUN (BA BUN) dapat dilihat di **Lampiran LB13.**

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL

C.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN SAL

Ringkasan Laporan Perubahan SAL selama periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	**478.957.156.319.401**	**337.779.006.818.346**
Penggunaan SAL	(35.000.000.000.000)	-
Saldo Anggaran Lebih (SAL) setelah Penggunaan SAL	**443.957.156.319.401**	**337.779.006.818.346**
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	**19.376.178.937.101**	**130.558.467.051.951**
Penyesuaian Pembukuan	(3.548.034.701.030)	11.648.084.260.735
Penyesuaian Lain-lain	(287.428.484.774)	(1.028.401.811.631)
Total Penyesuaian	**(3.835.463.185.804**	**10.619.682.449.104**
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir	**459.497.872.070.698**	**478.957.156.319.401**

C.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN SAL

C.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari Akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan ditambah/dikurangi penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih awal per 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp478.957.156.319.401 yang merupakan Saldo Anggaran Lebih Fisik per 31 Desember 2022. Saldo Anggaran Lebih Fisik meliputi Kas BUN, Kas di KPPN, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU yang telah disahkan dan Kas Hibah di Kementerian Negara/Lembaga yang telah disahkan setelah memperhitungkan Utang PFK, Utang Kepada Pihak Ketiga, dan penyesuaian karena selisih transaksi Kiriman Uang, Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan dan transito lainnya pada tahun 2022. Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal adalah sebagai berikut:

Uraian	1 Januari 2023]	1 Januari 2022
Saldo Anggaran Lebih Awal		
Kas BUN	394.096.461.571.443	253.683.550.805.313
Kas di KPPN	2.774.997.342.454	721.442.531.795
Kas di Bendahara Pengeluaran	215.927.152.362	248.050.262.873
Kas pada BLU yang sudah disahkan	78.971.222.880.967	81.993.516.161.352
Kas Hibah Langsung K/L yg telah Disahkan	2.895.708.729.836	1.745.056.899.938
Saldo Anggaran Lebih Awal sebelum Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	**478.954.317.677.062**	**338.391.616.661.271**
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL		
Dana di Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN	-	-
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pengurang Fisik SAL	5.390.038.579	(612.602.571.149)
Utang kepada Pihak Ketiga Pengurang Fisik SAL	210.753.180	(156.183.292)
Selisih Kiriman Uang	649.111.176	150.229.276
Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan	3.355.675.440	-
Transito Transaksi Remunerasi TDF-TKD	(6.766.936.036)	-
Transito Lainnya	-	(1.317.760)
Penempatan Dana di Bank Umum	-	-
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	**2.838.642.339**	**(612.609.842.925)**
Saldo Anggaran Lebih Awal	**478.957.156.319.401**	**337.779.006.818.346**

Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal Per 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022

C.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan Dana SAL pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebesar minus Rp35.000.000.000.000 dan Rp0. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN TA 2023, Pemerintah telah menganggarkan Penerimaan Pembiayaan Lainnya dari Saldo Anggaran Lebih yang terakhir diubah rinciannya melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023. Kemudian pada pasal 8 PMK Nomor 147/PMK.05/2021 tentang Pengolaan Saldo Anggaran Lebih dinyatakan bahwa SAL digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kas temporer, pemenuhan pembiayaan anggaran dan/atau stabilisasi. Penggunaan SAL dilakukan dengan terlebih dahulu memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berikutnya. Penggunaan Dana SAL dalam rangka pemenuhan pembiayaan anggaran sebesar minus Rp35.000.000.000.000 merupakan seluruhnya bersumber dari Penggunaan SAL sebesar Rp35.000.000.000.000 yang berasal dari Rekening Lain BI SAL IDR.

C.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan. LPSAL LKBUN tidak menggunakan nilai SiLPA/SiKPA yang tertera pada LRA LKBUN dikarenakan transaksi yang tertuang dalam LRA LKBUN hanya terbatas pada lingkup Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, tidak dapat mencerminkan keseluruhan realisasi pendapatan dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN (BA BUN dan BA K/L). Pada LKBUN, nilai SiLPA/SiKPA tersebut tercermin pada akumulasi Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi dan Aktivitas Pendanaan pada LAK. SiLPA pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp19.376.178.937.101 dan Rp130.558.467.051.951. SiLPA Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp111.182.288.114.850 atau turun 85,16% dari Tahun 2022. Penurunan SiLPA tersebut tergambar pada penurunan Arus Kas Bersih Tahun 2023 dari Aktivitas Investasi dan Aktivitas Pendanaan masing-masing sebesar Rp44.450.879.261.793 dan Rp252.371.817.375.519 walaupun terdapat kenaikan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp185.640.408.522.462 jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih pada Tahun 2022.

Adapun rincian SiLPA adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(34.793.236.369.070)	(220.433.644.891.532)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(391.624.901.747.838)	(347.174.022.486.045)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	445.794.317.054.009	698.166.134.429.528
SiLPA/(SiKPA)	**19.376.178.937.101**	**130.558.467.051.951**

Rincian SILPA TA 2023 dan TA 2022

C.2.4. Penyesuaian SAL

C.2.4.1. Penyesuaian Pembukuan

Penyesuaian Pembukuan pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar minus 3.548.034.701.030 dan Rp11.648.084.260.735. Penyesuaian Pembukuan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 15.196.118.961.765 atau turun 130,46% dari Tahun 2022.

Penyesuaian Pembukuan merupakan penyesuaian/koreksi tahun berjalan akibat koreksi SiLPA dan selisih kurs (*unrealized*), koreksi kas dan koreksi utang yang berpengaruh terhadap perhitungan SAL.

Adapun rincian Penyesuaian Pembukuan adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022
Koreksi SiLPA	1.496.864.847.086	9.137.971.841.987
Selisih Kurs Kas BUN *(Unrealized)*	(529.364.838.247)	3.676.340.697.318
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas BUN	(243.005.835.551)	(87.732.477.966)
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas KPPN	-	-
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas Hibah	(27.019.436.853)	(58.478.443.129)
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas BLU	(4.264.411.251.718)	(1.098.251.792.777)
Koreksi Utang PFK	-	-
Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)	(200.381.898)	3.359.288.846
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN)	19.102.196.151	74.875.146.456
Pembulatan	-	-
Jumlah Penyesuaian Pembukuan	**(3.548.034.701.030)**	**11.648.084.260.735**

Rincian Penyesuaian Pembukuan TA 2023 dan TA 2022

Penjelasan Penyesuaian Pembukuan sebesar minus Rp3.548.034.701.030 terdiri dari:

C.2.4.1.1. Koreksi SILPA

Koreksi SILPA sebesar Rp1.496.864.847.086 terdiri dari pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu sebesar minus Rp107.084.277.228 serta penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA (311211) sebesar Rp1.603.949.124.314. Pengembalian atas pendapatan TAYL terdiri dari transaksi pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan akun SiLPA (311212) melalui penerbitan SPM PP senilai minus Rp105.394.184.105 dan transaksi pengembalian Pendapatan Hibah melalui penerbitan SP3HL dengan akun 311911 senilai minus Rp1.690.093.123.

C.2.4.1.2. Selisih Kurs (*Unrealized*)

Penyesuaian Selisih Kurs Belum Terealisasi *(Unrealized)* sebesar minus Rp529.364.838.247 merupakan penyesuaian yang berasal dari perhitungan keuntungan selisih kurs sebesar Rp1.596.970.205.995 dan kerugian selisih kurs sebesar minus Rp2.126.335.044.242 yang belum terealisasi pada Kas di Rekening Valas yang dikelola oleh BUN.

C.2.4.1.3. Koreksi Kas BUN

Koreksi Kas BUN sebesar minus Rp243.005.835.551 merupakan pengeluaran kas dari Rekening Khusus dalam rangka pengembalian (*refund*) penerimaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri TAYL yang menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2017 tentang Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri tidak dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan melainkan sebagai koreksi kas.

C.2.4.1.4. Koreksi Kas BLU

Koreksi Kas BLU sebesar minus Rp4.264.411.251.718 merupakan koreksi atas saldo Kas BLU yang sudah disahkan yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN) karena adanya perekaman saldo awal BLU baru pada tahun 2023, penyesuaian saldo Kas BLU akibat likuidasi, penyesuaian saldo kas akibat perubahan menjadi PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) serta koreksi kas BLU dalam rangka reklasifikasi investasi jangka pendek ke investasi jangka panjang Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Rincian koreksi Kas BLU pada tahun 2023 terdapat pada KPPN sebagai berikut:

No.	KPPN	Jumlah (Rp)
1	BANDA ACEH (001)	(76.588.465.871)
2	PADANG SIDEMPUAN (006)	418.025.000
3	PALEMBANG (014)	30.699.248.043
4	JAKARTA II (019)	(1.237.533.101.940)
5	BANDUNG I (022)	-
6	SEMARANG I (026)	(432.397.523.273)
7	PURWOKERTO (029)	4.314.507.894
8	YOGYAKARTA (030)	(139.720.172.187)
9	SURABAYA I (031)	(123.938.809.876)
10	DENPASAR (037)	(298.090.615)
11	PONTIANAK (042)	(998.453.055)
12	PALU (051)	217.724.588
13	KARAWANG (086)	2.352.393.404
14	TANGERANG (127)	(2.342.552.346.684)
15	JEMBER (131)	32.923.674.627
16	MAKASSAR II (136)	-
17	BATAM (137)	18.690.138.227
Jumlah Koreksi Kas BLU		**(4.264.411.251.718)**

Rincian Koreksi Kas BLU TA 2023

Koreksi Kas BLU paling besar terdapat pada KPPN Tangerang, koreksi tersebut merupakan jurnal penyesuaian pada satker Universitas Terbuka (677531) yang berubah status menjadi PTN-BH. Sedangkan koreksi terbesar kedua berada pada KPPN Semarang I, koreksi tersebut menrupakan jurnal penyesuaian pada satker Universitas Negeri Semarang (677507) yang berubah status menjadi PTN-BH.

Koreksi Kas BLU pada KPPN Jakarta II merupakan jurnal penyesuaian saldo kas BLU pada Satker (409999) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dalam rangka reklasifikasi investasi jangka pendek ke investasi jangka panjang.

Koreksi Kas BLU pada KPPN Bandung merupakan jurnal penyesuaian saldo kas BLU antar satker dalam satu lingkup wilayah kerja KPPN yang sama, yaitu dari satker BLU BKPM (415381) ke satker Rumah Sakit Paru DR.H.A. Rotinsulu (415481) sebesar Rp9.670.589.219.

Koreksi Kas BLU pada KPPN Makassar II merupakan jurnal penyesuaian saldo kas BLU antar satker dalam satu lingkup wilayah kerja KPPN yang sama, yaitu dari satker Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjudin Chalid Makassar (258462) ke satker Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Sulawesi Selatan (415401) sebesar Rp1.520.896.173.

C.2.4.1.5. Koreksi Kas Hibah

Koreksi Kas Hibah sebesar minus Rp27.019.436.853 merupakan koreksi atas saldo hibah yang sudah disahkan pada tahun 2023 di Kuasa BUN (KPPN). Koreksi atas saldo Kas Hibah ini dikarenakan adanya pengesahan hibah luar negeri TAYL dengan nilai neto sebesar Rp2.839.196.445, revaluasi saldo kas hibah sebesar minus Rp 25.765.188.423, reklasifikasi kas hibah ke kas BLU sebesar minus Rp93.447.775, serta penyesuaian kas hibah akibat kesalahan pembukukan pendapatan hibah sebesar minus Rp3.999.997.100.
Rincian koreksi Kas Hibah pada tahun 2023 pada masing-masing KPPN sebagai berikut:

No.	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN Gorontalo (050)	(3.999.997.100)
2	KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah (140)	(23.019.439.753)
Jumlah Koreksi Kas Hibah		**(27.019.436.853)**

Rincian Koreksi Kas Hibah TA 2023

C.2.4.1.6. Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)

Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) sebesar minus Rp200.381.898 merupakan koreksi terhadap saldo Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) yaitu berupa penyesuaian akibat revaluasi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) dalam Valas sebesar minus Rp197.597.939, selisih kurs sebesar Rp20.447 dan penyesuaian saldo Utang kepada pihak ketiga tidak dimintakan kembali pada KPPN Khusus Penerimaan sebesar minus Rp2.804.406. Rincian koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) yang dilakukan pada tahun 2023 per KPPN dapat dirinci sebagai berikut:

No.	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN Jakarta I (018)	(15.470.332)
2	KPPN Jakarta II (019)	(50.190.077)
3	KPPN Jakarta VI (175)	(9.410.493)
4	KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah (140)	(74.175.236)
5	KPPN Khusus Penerimaan (901)	(2.804.406)
6	Direktorat Pengelolaan Kas Negara (999)	(48.331.354)
Jumlah Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga		**(200.381.898)**

Rincian Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) TA 2023

Sedangkan rincian penyesuaian saldo Utang kepada pihak ketiga tidak dimintakan kembali pada KPPN Khusus Penerimaan sebesar minus Rp2.804.406 dapat dirinci sebagai berikut:

No.	KPPN	Jumlah (Rp)
1	Bank Mandiri Tahun 2023	1.463.098
2	POS Indonesia Tahun 2023	2.566.928
3	BPD Bengkulu Tahun 2023	7.727
4	Jurnal Pengakuan Utang Lebih Limpah Mandiri Tahun 2016	(6.842.159)
Jumlah		**(2.804.406)**

C.2.4.1.7. Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN)

Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp19.102.196.151 merupakan penyesuaian terhadap saldo-saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN), karena adanya Revaluasi Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Valas sebesar Rp24.325.275.958, Selisih Kurs antara SPM dengan SP2D sebesar minus Rp5.357.758.595 serta koreksi akuntansi/pembukuan lainnya sebesar Rp134.678.788. Rincian koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran pada tahun 2023 pada masing-masing KPPN sebagai berikut:

No.	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN Jakarta I (018)	18.704.404.059
2	KPPN Jakarta II (019)	(24.136.062)
3	KPPN Jakarta III (088)	12.241.653
4	KPPN Jakarta IV (133)	(35.125.988)
5	KPPN Jakarta V (139)	171.141.398
6	KPPN Jakarta VI (175)	277.601.511
7	KPPN Jakarta VII (182)	(3.930.420)
Jumlah Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran		**19.102.196.151**

Rincian Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023

C.2.4.2. Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)

Penyesuaian Lain-lain pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar minus Rp287.428.484.774 dan minus Rp1.028.401.811.631. Penyesuaian Lain-lain Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp740.973.326.857 atau naik 72,05% dari Tahun 2022. Penyesuaian lain-lain merupakan penyesuaian terhadap perhitungan catatan SAL yang dilakukan sebagai hasil rekonsiliasi antara catatan SAL dengan fisik SAL pada akhir periode pelaporan. Adapun rincian Penyesuaian Lain-lain adalah sebagai berikut :

Uraian	TA 2023	TA 2022
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris	-	-
Penyesuaian Transaksi RPL	(290.350.819.934)	(1.028.102.350.599)
Penyesuaian Transaksi Rekening Escrow	160.185.740	(150.549.516)
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yg Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	2.762.149.420	(148.911.516)
Pembulatan	-	-
Jumlah Penyesuaian Lain-Lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)	**(287.428.484.774)**	**(1.028.401.811.631)**

Rincian Penyesuaian Lain-lain TA 2023 dan TA 2022

Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL terkait dengan transaksi Rekening Pemerintah Lainnya (RPL), Rekening *Escrow*, dan Kas Transitoris merupakan penyesuaian catatan SAL yang harus dilakukan dalam rangka menyajikan nilai catatan SAL yang sesuai dengan fisik SAL. RPL, Rekening *Escrow*, dan Kas Transitoris bukan merupakan bagian fisik SAL, namun pada nilai catatan SAL (yang merupakan akumulasi SiLPA tahun lalu ditambah dengan SiLPA tahun berjalan) masih terpengaruh oleh transaksi-transaksi dari aktivitas rekening tersebut. Penyesuaian Transaksi RPL sebesar minus Rp290.350.819.934 dan Penyesuaian Transaksi Rekening *Escrow* sebesar Rp160.185.740 merupakan nilai total transaksi yang memengaruhi Catatan SAL tahun berjalan yang berasal dari aktivitas transaksi rekening non-SAL tersebut. Dengan demikian, nilai-nilai ini harus disesuaikan terhadap catatan SAL sehingga tersaji nilai SAL yang sesungguhnya.

Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL sebesar Rp2.762.149.420 merupakan perhitungan penyesuaian Fisik SAL TAYL yg perlu dibalik pada tahun berjalan. Penyesuaian ini harus dilakukan pada tahun berjalan untuk menghindari adanya pencatatan/perhitungan ganda pada Catatan SAL, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	TA 2023
Selisih Kiriman Uang TAYL	(649.111.176)
Pendapatan Hibah Dalam Rekening Khusus Ditangguhkan TAYL	(3.355.675.440)
Transito Transaksi Remunerasi TDF-TKD	6.766.936.036
Pembulatan	
Jumlah Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	**2.762.149.420**

Selisih Kiriman Uang TAYL sebesar minus Rp649.111.176 merupakan penyesuaian saldo awal di tahun 2023 yang disebabkan pelimpahan antara rekening pemerintah pada akhir Desember 2022 yang baru diterima di awal Januari 2023.

Rincian perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022
Saldo Awal SAL	**478.957.156.319.401**	**337.779.006.818.346**
Koreksi Saldo Awal SAL	**-**	**-**
Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan TAB	**(35.000.000.000.000)**	**-**
SAL Awal setelah Penggunaan SAL & Koreksi Saldo Awal	**443.957.156.319.401**	**337.779.006.818.346**
SiLPA (SiKPA) Tahun Berjalan	**19.376.178.937.101**	**130.558.467.051.951**
SAL Akhir sebelum Penyesuaian SAL:	**463.333.335.256.502**	**468.337.473.870.297**
Penyesuaian Pembukuan:		
Koreksi SiLPA	1.496.864.847.086	9.137.971.841.987
Selisih Kurs Kas di BUN (*Unrelized*)	(529.364.838.247)	3.676.340.697.318
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas BUN	(243.005.835.551)	(87.732.477.966)
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas KPPN	-	-
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas Hibah	(27.019.436.853)	(58.478.443.129)
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas BLU	(4.264.411.251.718)	(1.098.251.792.777)
Pembulatan	-	-
Koreksi Utang PFK	-	-
Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)	(200.381.898)	3.359.288.846
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN)	19.102.196.151	74.875.146.456
Total Penyesuaian Pembukuan	**(3.548.034.701.030)**	**11.648.084.260.735**
Penyesuaian Catatan SAL		
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris	-	-
Penyesuaian Transaksi RPL	(290.350.819.934)	(1.028.102.350.599)
Penyesuaian Transaksi Rek. Escrow	160.185.740	(150.549.516)
Penyesuaian Terkait Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rek. RPL	-	-
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang perlu dibalik pada tahun berjalan	2.762.149.420	(148.911.516)
Transito Lainnya	-	-
Pembulatan	-	-
Total Penyesuaian Catatan SAL	**(287.428.484.774)**	**(1.028.401.811.631)**
Saldo Akhir SAL	**459.497.872.070.698**	**478.957.156.319.401**
SALDO AKHIR CATATAN SAL	**459.497.872.070.698**	**478.957.156.319.401**

Rincian Perhitungan Sisa Anggaran Lebih TA 2023 dan TA 2022

Rincian perhitungan dan penjelasan dari Penyesuaian Catatan SAL yang dilakukan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Uraian	TA 2023	TA 2022
Saldo Awal Utang PFK	3.916.380.112.882	3.765.331.476.323
Saldo Akhir Utang PFK	4.536.797.626.051	3.916.380.112.882
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir	620.417.513.169	151.048.636.559
Mutasi Transaksi PFK	620.329.866.094	151.170.449.070
Invoice PFK	87.647.075	121.812.511
Selisih Mutasi Saldo dan Mutasi Transaksi	**-**	**-**
Penjelasan Selisih:	**-**	**-**
Penyesuaian Catatan SAL: Selisih mutasi Transaksi PFK	**-**	**-**

Rincian Perhitungan dan Penjelasan Utang Perhitungan Fihak Ketiga TA 2023 dan TA 2022

2. Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)

Uraian	TA 2023	TA 2022
Saldo Awal Utang Kepada Pihak Ketiga	247.752.918.368	251.218.736.876
Saldo Akhir Utang Kepada Pihak Ketiga	128.907.360.569	247.752.918.368
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir	(118.845.557.799)	(3.465.818.508)
Mutasi Transaksi Utang kepada Pihak Ketiga	(119.045.939.697)	(106.529.662)
Selisih Mutasi Saldo dan Mutasi Transaksi	**(200.381.898)**	**(3.359.288.846)**
Penjelasan Selisih: Penyesuaian akibat revaluasi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) dalam Valas, selisih kurs dan penyesuaian saldo Utang kepada pihak ketiga tidak dimintakan kembali pada KPPN Khusus Penerimaan.	**(200.381.898)**	**(3.359.288.846)**
Penyesuaian Catatan SAL: Selisih mutasi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)	**-**	**-**

Rincian Perhitungan dan Penjelasan Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) TA 2023 dan TA 2022

3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	TA 2023	TA 2022
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	215.927.152.362	248.050.262.873
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	197.710.858.794	215.927.152.362
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir	18.216.293.568	32.123.110.511
Mutasi Transaksi Kas di Bendahara Pengeluaran	37.318.489.719	106.998.256.967
Selisih Mutasi Saldo dan Mutasi Transaksi	**19.102.196.151**	**74.875.146.456**
Penjelasan Selisih : Revaluasi, Penyesuaian Selisih Kurs dan Penyesuaian lainnya atas Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran (Jurnal Manual)	**19.102.196.151**	**74.875.146.456**
Penyesuaian Catatan SAL: Selisih mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran	**-**	**-**

Rincian Perhitungan dan Penjelasan Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023 dan TA 2022

4. Rekening Pemerintah Lainnya

Uraian	TA 2023	TA 2022
Saldo Awal Rekening Pemerintah Lainnya	5.203.653.636.302	5.951.791.475.377
Saldo Akhir Rekening Pemerintah Lainnya	3.379.352.455.808	5.203.653.636.302
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir	(1.824.301.180.494)	(748.137.839.075)
Koreksi Kas RPL	-	-
Mutasi Transaksi Rekening Pemerintah Lainnya	(2.114.652.000.428)	(1.776.240.189.674)
Selisih Mutasi Saldo dan Mutasi Transaksi	**(290.350.819.934)**	**(1.028.102.350.599)**
Penjelasan Selisih : Penyesuaian unsur Selisih Kurs di Rekening Migas dan Panas Bumi, Penerimaan di RPL yang belum dipindahbukukan ke RKUN	**(290.350.819.934)**	**(1.028.102.350.599)**
Penyesuaian Catatan SAL: Selisih mutasi Rekening Pemerintah Lainnya	**-**	**-**

Rincian Perhitungan dan Penjelasan Rekening Pemerintah Lainnya TA 2023 dan TA 2022

5. Rekening *Escrow*

Uraian	TA 2023	TA 2022
Saldo Awal Rekening Escrow	48.331.400.902.982	26.773.447.366.321
Saldo Akhir Rekening Escrow	143.663.249.475.207	48.331.400.902.982
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir	95.331.848.572.225	21.557.953.536.661
Mutasi Transaksi Rekening Escrow	95.332.008.757.965	21.557.802.987.145
Selisih Mutasi Saldo dan Mutasi Transaksi	**160.185.740**	**(150.549.516)**
Penjelasan Selisih : Penyesuaian unsur Selisih Kurs di Rekening Escrow Dana Cadangan Alutsista TNI AU dan Kemenhan serta penyesuaian dalam rangka penggunaan Dana SAL BUN dari Rekening Pembangunan Hutan sebagai Pembiayaan APBN Tahun 2023	**160.185.740**	**(150.549.516)**
Penyesuaian Catatan SAL: Selisih mutasi Rekening Escrow	**-**	**-**

Rincian Perhitungan dan Penjelasan Rekening Escrow TA 2023 dan TA 2022

C.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp459.497.872.070.698. Nilai saldo akhir SAL ini merupakan nilai yang telah sesuai antara perhitungan Catatan SAL dengan perhitungan Fisik SAL.

Adapun rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo Anggaran Lebih Akhir		
Kas BUN	342.835.699.040.576	394.096.461.571.443
Kas di KPPN	5.128.787.424.755	2.774.997.342.454
Kas di Bendahara Pengeluaran	197.710.858.794	215.927.152.362
Kas pada BLU yang sudah disahkan	92.393.578.520.721	78.971.222.880.967
Kas Hibah Langsung K/L yang telah Disahkan	13.992.553.217.607	2.895.708.729.836
Total Saldo Anggaran Lebih Sebelum Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	**454.548.329.062.453**	**478.954.317.677.062**
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL		
Dana di Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN	-	-
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Penyesuai Fisik SAL	(44.029.816.776)	5.390.038.579
Utang kepada Pihak Ketiga Penyesuai Fisik SAL	(513.135.846)	210.753.180
Penyesuaian Rekening Khusus		-
Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan	(3.336.178.894)	3.355.675.440
Uang Muka Belanja Pegawai (*Prepayment*)	-	-
Penyetoran Dana Hibah Langsung Yang Disahkan		-
Pengembalian Escrow PNBP	-	-
Penyesuaian Selisih Kiriman Uang	4.129.878.872	649.111.176
Transito Transaksi Remunerasi TDF-TKD	(6.707.739.111)	(6.766.936.036)
Transito Lainnya	-	-
Transito Hibah	-	-
Penempatan Dana di Bank Umum	5.000.000.000.000	-
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	**4.949.543.008.245**	**2.838.642.339**
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**459.497.872.070.698**	**478.957.156.319.401**

Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Dengan demikian, terdapat penurunan Saldo SAL pada Tahun 2023 sebesar Rp19.459.284.248.703 atau turun 4,06 % dari Saldo SAL Tahun 2022.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Lancar	516.599.537.055.275	538.706.231.713.917
Investasi Jangka Panjang	4.077.230.147.021.115	3.759.590.948.039.254
Aset Tetap	1.103.692.967.001	1.046.802.105.728
Properti Investasi	32.335.552.112.417	31.062.733.305.865
Piutang Jangka Panjang	47.830.027.314.323	52.136.458.878.032
Aset lainnya	872.442.600.802.495	730.812.322.007.366
Jumlah Aset	**5.547.541.557.272.626**	**5.113.355.496.050.162**
Kewajiban Jangka Pendek	1.021.405.167.888.606	851.240.032.862.444
Kewajiban Jangka Panjang	7.854.324.339.772.497	7.524.375.730.483.493
Jumlah Kewajiban	**8.875.729.507.661.103**	**8.375.615.763.345.937**
Jumlah Ekuitas	**(3.328.187.950.388.477)**	**(3.262.260.267.295.775)**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**5.547.541.557.272.626**	**5.113.355.496.050.162**

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

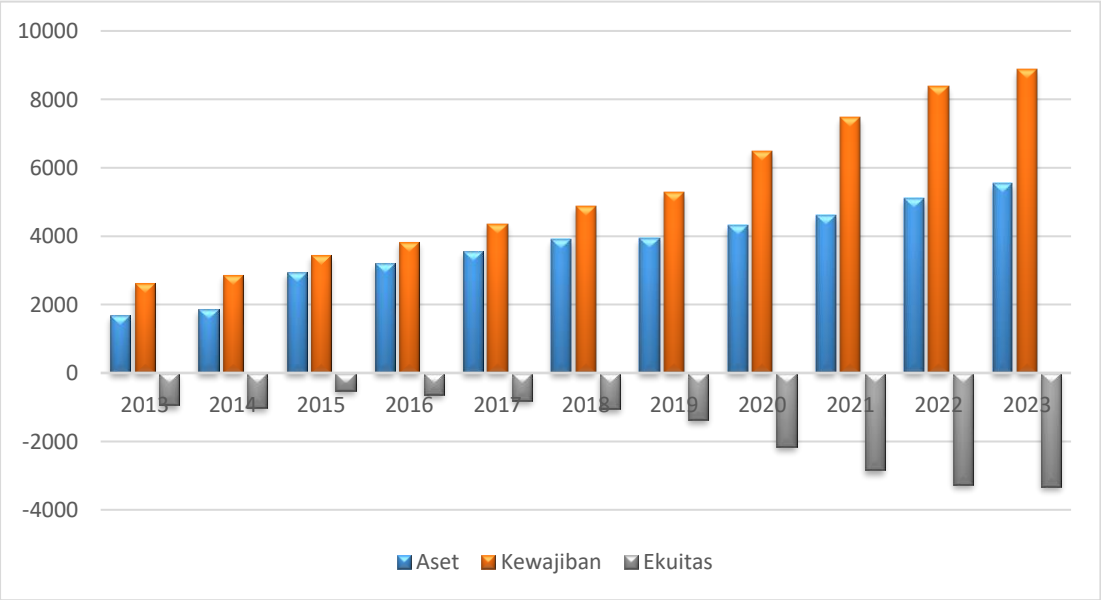

D.2. PENJELASAN PER POS NERACA

D.2.1. ASET

D.2.1.1. ASET LANCAR

D.2.1.1.1. KAS DI REKENING PEMERINTAH DI BANK INDONESIA DAN BANK UMUM DALAM RUPIAH

Kas di Rekening Pemerintah di BI dan Bank Umum merupakan rekening yang digunakan untuk menampung penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. Saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp149.595.370.820.262 dan Rp238.395.756.100.437 atau mengalami penurunan sebesar Rp88.800.385.280.175 (37,25%). Saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah per 31 Desember 2023 sebesar Rp149.595.370.820.262 yang disajikan pada Neraca LKBUN merupakan hasil rekonsiliasi kas antara pencatatan SPAN dengan pihak perbankan. Dibandingkan dengan total saldo Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah pada rekening koran sebesar Rp202.032.900.839.795 terdapat selisih sebesar Rp52.437.530.019.467 yang dapat dijelasakan sebagai berikut:

- Terdapat selisih lebih karena kesalahan pemindahbukuan dari dan ke RKUN sebesar Rp89.642.541.396;
- Terdapat selisih kurang karena SP2D Gagal Salur dan Reject atas penyaluran DBH Tunai, DBH Non Tunai, dan Belanja pihak ketiga dengan total nilai sebesar Rp52.157.799.683.929 yang dana nya masih berada pada Rekening Penempatan Dalam Rupiah dan RPKBUNP SPAN Non Gaji sebesar total Rp52.157.799.683.929;
- Terdapat selisih kurang karena kesalahan perbankan lainnya atas penyaluran SP2D pada Bank BNI sebesar Rp369.372.877.000.
- Terdapat pembulatan sebesar Rp66.

Perubahan saldo yang memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap penurunan saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah adalah penurunan saldo pada Rekening Lain BI SAL (500000002980). Penurunan saldo pada Rekening Lain BI SAL disebabkan adanya penggunaan SAL sebagai pembiayaan APBN Tahun 2023 sebesar Rp35.000.000.000.000 dan penggunaan SAL untuk memenuhi kebutuhan kas temporer (peminjaman SAL) sebesar Rp90.000.000.000.000 yang baru dikembalikan pada tanggal 2 Februari 2024. Saldo dana SAL BUN pada Rekening Lain BI SAL dalam Rupiah adalah sebesar Rp121.859.042.325.583 namun secara substansi jika memperhitungkan peminjaman SAL dalam rangka pemenuhan kebutuhan kas temporer sebesar Rp90.000.000.000.000 maka saldo dana SAL BUN adalah sebesar Rp121.949.042.325.583 yang disimpan pada:

- Saldo Kas di Rekening Lain BI SAL dalam Rupiah sebesar Rp121.859.042.325.583;
- Saldo kas di RKUN dalam rupiah dan/atau dalam valuta asing sebesar peminjaman SAL dalam rangka pemenuhan kebutuhan kas temporer yaitu Rp90.000.000.000.000.

Rincian saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada lampiran LD1a.

D.2.1.1.2. KAS DI REKENING PEMERINTAH DI BANK INDONESIA DAN BANK UMUM DALAM VALUTA ASING

Saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Valuta Asing merupakan saldo rekening pemerintah di BI dan Bank Umum yang digunakan untuk menampung penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara dalam valuta asing. Saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Valuta Asing per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp193.240.328.220.314 dan Rp155.700.705.471.006 atau mengalami kenaikan sebesar Rp37.539.622.749.308 (24,11%). Kenaikan tersebut bersumber dari beragam faktor karena salah satu komponen pembentuk saldo pada pos kas di rekening pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam valuta asing adalah Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dan Rekening Kas Penempatan dalam valuta asing yang merupakan rekening tujuan akhir atas transaksi penerimaan negara baik berupa pendapatan perpajakan/non pajak maupun penerimaan pembiayaan dalam valuta asing, dengan rincian yang disajikan pada lampiran LD1b.

Adapun secara umum melihat rincian kenaikan/penurunan saldo di tiap-tiap rekening pada pos Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam valuta asing, maka penyumbang terbesar kenaikan saldo pos tersebut dipengaruhi oleh Pembentukan Rek Lain BI SAL USD (609028411980). Peningkatan saldo pada Rek Lain BI SAL USD bersumber dari transaksi pemindahbukuan dari RKUN USD ke Rek Lain BI SAL USD dalam rangka pemindahan Dana SAL BUN ke Rekening SAL berdasarkan Berita Acara Perhitungan Dana SAL BUN 2022 sesuai LKPP 2022 Audited serta KEP-47/PB/PB.3/2023 tentang Pemindahbukuan Dana SAL BUN 2022 dalam rangka Pemenuhan Dana SAL BUN sebesar USD8.415.517.653 atau ekuivalen Rp131.214.751.245.576 (kurs LKPP 2022 Audited Rp15.592).

D.2.1.1.3. KAS DI REKENING PEMERINTAH LAINNYA

Jumlah Kas di Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp3.507.746.680.531 dan Rp5.451.617.307.850 atau mengalami penurunan sebesar Rp1.943.870.627.319 (35,66%) merupakan saldo Rekening Pemerintah Lainnya yang ada di BI dan Bank Umum yang menampung rekening pemerintah selain rekening penerimaan dan rekening pengeluaran. Penurunan saldo tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh Rekening Pengelolaan Migas (DEPKEU K/HASIL MINYAK PERJANJIAN KARYA PRODUCTION SHARING) yang pada tahun 2023 mengalami penurunan saldo sebesar Rp2.148.873.274.645 atau 59,44 persen dibandingkan dengan saldo tahun 2022. Berdasarkan peruntukannya, rekening pengelolaan migas ini dibuka untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar pengeluaran terkait kegiatan usaha hulu migas. Aliran uang masuk pada rekening ini dikategorikan sebagai penerimaan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S), bagian Pemerintah dari Sumber Daya Alam yang meliputi: hasil penjualan minyak mentah, hasil penjualan gas alam, dan *over lifting*.

Rincian rekening yang membentuk saldo pada pos Rekening Pemerintah Lainnya tersaji pada lampiran LD2.

D.2.1.1.4. KAS DI REKENING KAS DI KPPN

Saldo Kas di Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp5.128.787.424.755 dan Rp2.774.997.342.454 atau mengalami kenaikan sebesar Rp2.353.790.082.301 (84,82%) merupakan saldo pada Kas di Rekening Penerimaan (Persepsi/Devisa Persepsi) sebesar Rp5.128.787.424.748 dan Saldo pada Kas di Rekening Sub RKUN Penerimaan sebesar Rp7. Kenaikan tersebut disebabkan adanya penerimaan negara yang datanya berasal dari MPN G3 yang belum dilimpahkan ke RKUN.
Saldo Kas KPPN pada Rekening Penerimaan (Persepsi/Devisa Persepsi) pada KPPN Khusus Penerimaan merupakan saldo rupiah dan setara rupiah dengan kurs JISDOR Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2023 pada *collecting agent*.
Daftar Rincian Saldo Kas di KPPN dapat dilihat pada lampiran LD3.

Terdapat selisih sebesar Rp36.449.754.915 antara Saldo Kas KPPN pada Rekening Penerimaan pada KPPN Khusus Penerimaan sebesar Rp5.128.787.424.755 dengan saldo rekening koran pada KPPN Khusus Penerimaan sebesar Rp5.165.237.179.670. Adapun rincian selisih sebesar Rp36.449.754.915 adalah sebagai berikut:

RINCIAN SELISIH	KETERANGAN	NILAI	TINDAK LANJUT ATAS SELISIH
RK ONLY	Transaksi yang hanya dicatat di Rekening CA, namun bukan transaksi MPN	1.880.630.391	Dilakukan Koreksi Pendebetan di Rekening CA
DUPLIKASI	Pencatatan dobel (lebih dari satu kali) kode billing pada catatan rekening CA	501.329.096	Dilakukan Koreksi Pendebetan di Rekening CA
SETTLEMENT ONLY	Kode billing hanya ada di settlement, namun tidak ada di Rekening CA	(621.231.715)	Dilakukan Koreksi Pendebetan di Rekening CA
PENDEBETAN RK	Pengurangan di rekening CA yang bukan transaksi pelimpahan ke negara	(57.789.478)	Dilakukan Koreksi Pendebetan di Rekening CA
PERBEDAAN PENCATATAN	Perbedaan tanggal pencatatan antara rekening koran CA dengan catatan di settlement	34.127.770.252	Tidak ada tindak lanjut, karena akan match di tanggal/bulan berikutnya
BEDA NOMINAL	Nominal yang tercatat pada CA berbeda dengan yang seharusnya terdapat di settlement	748.075.514	Dilakukan koreksi perbaikan nominal di CA untuk disesuaikan dengan nominal sebenarnya
LAIN-LAIN	Adanya duplikasi yang terjadi pada periode sebelumnya yang belum terselesaikan per 31 Desember 2023	1.145.012	Penyelesaian sesuai dengan tindak lanjut yang belum dieksekusi
PEREKAMAN LEBIH LIMPAH	Perekaman lebih limpah dari *collecting agent* ke SUB RKUN Penerimaan	(130.170.848)	Lebih limpah akan diperhitungkan pada penyetoran penerimaan negara periode berikutnya
PEMBULATAN		(3.309)	
TOTAL SELISIH		**36.449.754.915**	

D.2.1.1.5. KAS DALAM TRANSITO

Saldo Kas Dalam Transito per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp4.930.665.723 dan Rp799.340.452. Saldo tersebut terdiri dari kas dalam transito pada BUN, rekening pinjaman/hibah, dan transaksi DTP pada seluruh rekening yang dikelola oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa BUN Pusat dan KPPN selaku Kuasa BUN Daerah ditambah selisih penerimaan kiriman uang dan pengeluaran kiriman uang. Kas Dalam Transito pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp4.131.325.271 atau 516,84 persen dibandingkan periode akhir tahun 2022 adanya penihilan RPKBUN Valas USD BRI (D0021) yang diterima di RKUN USD tgl 2 Januari 2024 sejumlah USD317.473,11 atau equivalen Rp4.901.467.345 (kurs JISDOR 31 Desember 2023 yaitu Rp15.439), dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kas Dalam Transito BUN	800.786.851	150.229.276
Selisih Kiriman Uang	4.129.878.872	649.111.176
Total	4.930.665.723	799.340.452

D.2.1.1.6. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp197.710.858.794 dan Rp215.927.152.362 atau mengalami penurunan sebesar Rp18.216.293.568 (8,44%). Kementerian dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran terbesar diantaranya:

1. Kementerian Luar Negeri sebesar Rp118.552.365.738;
2. Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp27.282.699.334;
3. Badan Pengawasan Pemilihan Umum sebesar Rp17.135.840.164;
4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebesar Rp5.872.433.714;
5. Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp5.343.810.336.

Kas di Bendahara pengeluaran adalah total saldo yang dibukukan seluruh KPPN atas saldo kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran satuan kerja mitra kerja KPPN yang berasal dari Uang Persediaan (UP). Kas Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran menurut data KPPN yang telah diverifikasi dengan data Kementerian Negara/Lembaga.

Daftar Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada lampiran LD4, LD4a.

Fluktuasi penurunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Saldo awal Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp215.927.152.362.
b. Terdapat penyelesaian saldo TA 2022 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp211.518.476.561 pada 448 satker.

c. Terdapat penambahan Kas di Bendahara Pengeluaran pada 155 satker sebesar Rp32.392.457.716.

d. Terdapat Kas di BP TA 2023 yg belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp141.807.529.126 pada 453 satker.

e. Terdapat koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran pada 30 satker sebesar Rp619.464.743 dan adanya penyesuaian selisih kurs pada 213 satker sebesar Rp18.482.731.408.

f. Sehingga saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp197.710.858.794.

D.2.1.1.7. KAS LAINNYA PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Jumlah Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp13.992.553.217.607 dan Rp2.895.708.729.836 atau mengalami kenaikan sebesar Rp11.096.844.487.771 (383,22%) merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang berasal dari selisih antara pendapatan dan belanja Hibah Langsung yang diterima Kementerian Negara/Lembaga dan telah disahkan ke KPPN sampai dengan 31 Desember 2023. Kas Lainnya pada Kementerian/Lembaga dengan saldo Kas Lainnya terbesar diantaranya:

1. Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp9.405.390.620.027;
2. Badan Pengawasan Pemilihan Umum sebesar Rp2.526.531.180.649;
3. Kementerian Kesehatan sebesar Rp637.170.421.437;
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp481.490.774.994;
5. Kementerian Sosial sebesar Rp276.357.192.061.

Rincian saldo Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga yang berasal dari hibah langsung dapat dilihat di lampiran LD5, LD5a.

Fluktuasi kenaikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Terdapat 29 satker yang tidak kembali mendapatkan hibah sehingga pendapatan hibah yang telah disahkan pada TA 2022 sebesar Rp111.010.835.678 digunakan seluruhnya pada TA 2023 sehingga saldo akhir Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga tersebut disajikan nihil.

b. Terdapat penambahan pendapatan hibah yang telah disahkan baru pada TA 2023 pada 543 satker sebesar Rp12.313.164.696.954 sehingga nilai saldo ahir Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga TA 2023 menjadi sebesar Rp12.313.164.696.954.

c. Terdapat penurunan saldo dari 43 satker sebesar Rp1.105.309.373.505 yang berasal dari selisih saldo awal TA 2023 sebesar Rp2.784.697.894.158 dengan saldo akhir TA 2023 sebesar Rp1.679.388.520.653.

d. Sehingga saldo akhir Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga adalah sebesar Rp13.992.553.217.607.

D.2.1.1.8. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp5.008.114.675.567 dan Rp29.899.867.163 atau mengalami kenaikan sebesar Rp4.978.214.808.404 (16.649,62%). Akun ini merupakan Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari BA 999.00, BA 999.07 dan BA 999.08. Detail menurut BA BUN adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

No	BA BUN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	999.00	5.000.000.000.000	-
2.	999.07	709	37.162
3.	999.08	8.114.674.858	29.899.830.001
Total		5.008.114.675.567	29.899.867.163

1. Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.00

Saldo Kas Lainnya dan Setara kas pada neraca tingkat Kuasa BUN Pusat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.000.000.000.000 dan Rp0. Saldo Kas Lainnya dan Setara kas per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp5.000.000.000.000 atau naik 100 persen. Saldo pada neraca menunjukkan nilai *outstanding* transaksi penempatan kas Pemerintah di bank umum atau instrumen lainnya untuk jangka waktu 0 s/d 3 bulan sesuai dengan PMK Nomor 03/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 115/PMK.05/2016. Transaksi penempatan uang negara pada bank umum mitra dilakukan melalui operasionalisasi *Treasury Dealing Room* (TDR) Direktorat PKN dengan berpedoman pada PMK Nomor 53/PMK.05/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 secara detail sebagai berikut:

No	Uraian Instrumen	Nama Bank/*counter party*	Suku Bunga/*Repo rate*	Nilai *Outsanding* (Rp)
1	Transaksi Penempatan Uang tanggal 27 Desember 2023 dengan tenor 14 hari	Bank BRI	7,90%	2.000.000.000.000
2	Transaksi Penempatan Uang tanggal 28 Desember 2023 dengan tenor 14 hari	Bank BTN	7,91%	1.500.000.000.000
3	Transaksi Penempatan Uang tanggal 28 Desember 2023 dengan tenor 14 hari	Bank BRI	7,85%	1.500.000.000.000
Jumlah				**5.000.000.000.000**

2. Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.07

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp709. Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas tersebut, Rp36.453 atau (98,09%) lebih kecil dari Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp37.162. Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 merupakan pendapatan jasa giro yang belum disetor per tanggal 31 Desember 2023.

Rincian jasa giro yang belum disetor sebagai berikut:

1. Saldo sebesar Rp709 terdapat pada Kementerian PUPR yaitu pendapatan jasa giro yang belum disetor pada Satker Ditjen Pembiayaan Perumahan per tanggal 31 Desember 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/ Kantor/ Pos	Saldo
1	0010103666778	RPL 019 DJPP UTK DANA SBUM	BPD SULAWESI TENGAH	393
2	70122065906	RPL 019 DJPP UTK DANA SBUM	DKI SYARIAH	316
Total				**709**

3. Kas lainnya dan setara kas pada BA.999.08

Saldo kas lainnya dan setara kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp8.114.674.858 dan Rp29.899.830.001. Saldo kas lainnya yang terdapat pada:

- Istana Kepresidenan Jakarta sebesar Rp8.114.674.857, merupakan Sisa Dana Banmas TA 2023 untuk digunakan pada Akhir TA 2023 dan Awal TA 2024 untuk memenuhi kebutuhan anggaran Banmas dalam rangka kunjungan kerja Presiden ke daerah selama akhir tahun 2023 dan minggu awal tahun 2024.
- Sekretariat Wakil Presiden sebesar Rp1, merupakan selisih Rp0,89 di saldo LS Bendahara atas biaya transfer Bantuan Kemasyarakatan keluar negeri yang jumlahnya dalam pecahan desimal dan tidak dapat disetorkan ketika dilakukan pengembalian belanja ke Kas Negara.

D.2.1.1.9. KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM

Jumlah Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp92.393.578.520.721 dan Rp78.971.222.880.967 atau mengalami kenaikan sebesar Rp13.422.355.639.754 (17,00%) terdiri dari Kas pada Badan Layanan Umum yang telah disahkan oleh KPPN melalui SP2D Pengesahan atas Pendapatan dan Belanja Operasional Badan Layanan Umum serta koreksi saldo awal kas pada Badan Layanan Umum sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Kementerian/Lembaga yang memiliki saldo kas pada Badan Layanan Umum terbesar diantaranya:

1. Kementerian Keuangan sebesar Rp65.437.847.737.894;
2. Kementerian Kesehatan sebesar Rp6.618.779.398.351;
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp6.513.489.713.722;
4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebesar Rp4.341.321.553.993;
5. Kementerian Agama sebesar Rp2.456.476.841.908.

Rincian Saldo Kas pada Badan Layanan Umum dapat dilihat pada lampiran LD6, LD6a, LD6b.

Fluktuasi penurunan Kas pada Badan Layanan Umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Terdapat tujuh BLU dengan nilai saldo awal sebesar Rp3.152.343.644.311 yang melaporkan tidak terdapatnya laba/rugi pada tahun berjalan dan menggunakan sisa Kas BLU TA 2022 seluruhnya sehingga saldo akhir Kas pada BLU tersebut pada TA 2023 disajikan nihil.

b. Terdapat penambahan baru Kas pada BLU di TA 2023 pada 51 BLU sebesar Rp546.064.824.154 yang diperoleh dari pengurangan pendapatan BLU yang telah disajikan dengan belanja BLU yang telah disahkan.

c. Terdapat 253 satker dengan saldo awal sebesar Rp75.818.879.236.656 dimana nilai pendapatan BLU yang disahkan lebih besar sebesar Rp16.028.634.459.911 dari belanja BLU yang disahkan sehingga saldo akhir meningkat menjadi sebesar Rp91.847.513.696.567.

d. Sehingga saldo akhir Kas pada Badan Layanan Umum adalah sebesar Rp92.393.578.520.721.

Kas pada Badan Layanan Umum sebesar Rp92.393.578.520.721 terdiri dari saldo Kas sebesar Rp57.124.640.159.483, Investasi Jangka Pendek sebesar Rp35.230.294.868.007, dan Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp38.643.493.231.

D.2.1.1.10. UANG MUKA DARI REKENING KHUSUS

Jumlah Uang Muka dari Rekening Khusus per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp44.479.546.335 dan Rp20.878.963.110 atau mengalami kenaikan sebesar Rp23.600.583.225 (113,04%). Uang Muka dari Rekening Khusus merupakan bagian dari kelompok akun uang muka rekening BUN yang digunakan untuk menampung pengeluaran-pengeluaran Satker yang telah diterbitkan SP2D atas kegiatan tertentu yang sumber dananya berasal dari Pinjaman dan Hibah dengan menggunakan mekanisme Rekening Khusus (Reksus) yaitu rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada BI atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah dan pada tanggal pelaporan keuangan belum dibebankan pada Rekening Khusus berkenaan. Uang Muka dari Reksus tersebut merupakan SPM Nihil yang telah diselesaikan pada tahun 2022.

Rincian Saldo Uang Muka Rekening BUN dapat dilihat pada lampiran LD7.

D.2.1.1.11. BELANJA DIBAYAR DI MUKA (*PREPAID*)

Jumlah Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp22.930.421.699 dan Rp22.006.153.883 atau mengalami kenaikan sebesar Rp924.267.816 (4,20%). Belanja dibayar di muka tahun 2023 tersebut terdapat pada SKK Migas merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima sebesar Rp22.913.422.941, pada MPPKP sebesar Rp11.730.758 dan pada DKPBPB Batam sebesar Rp5.268.000.

D.2.1.1.12. UANG MUKA BELANJA (*PREPAYMENT*)

Jumlah Uang Muka Belanja (*Prepayment*) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp10.000.000 dan Rp10.000.000, tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Uang Muka Belanja (*Prepayment*) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Saldo ini terdapat pada satker SKK Migas.

D.2.1.1.13. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp4.303.538.793.658 dan Rp4.121.830.752.438 atau mengalami kenaikan sebesar Rp181.708.041.220 (4,41%). Rincian Pendapatan yang masih harus diterima sebagai berikut:

1. BA 999 01 sebesar Rp3.166.144.779.080 merupakan penyesuaian akrual kontribusi BI dari tanggal kontribusi BI terakhir sampai dengan tanggal pelaporan. Saldo tersebut mengalami kenaikan Rp Rp347.197.090.899 (12,32%) dibanding dengan tahun 2022 sebesar Rp2.818.947.688.181.
2. BA 999 03 sebesar Rp22.651.238.774 merupakan pendapatan yang masih harus diterima berasal pengakuan pendapatan pada UAKPA KBUMN dan UAKPA Direktorat EAS dengan rincian :
   a. Pendapatan yang masih harus diterima pada UAKPA Kementerian BUMN yaitu pengakuan akrual atas bunga yang belum jatuh tempo atas investasi non permanen pada BUMN selaku Penerima Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan rincian sebagai berikut:

No	Perusahaan Negara selaku Penerima Investasi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	-	15.072.130.141
2	PT Perkebunan Nusantara III	10.898.684.091	8.755.845.888
3	Perum Perumnas	3.250.000.000	3.250.000.000
Total		**14.148.684.091**	**27.077.976.029**

   b. Pendapatan yang masih harus diterima pada UAKPA Direktorat EAS pada 31 Desember 2023 sebesar Rp8.502.554.683 yang berasal dari pendapatan yang masih harus diterima yang terkait dengan Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Loss Limit untuk pelaku usaha UMKM.

      Pada 18 Desember 2023 telah dibayarkan Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan untuk Pelaku Usaha UMKM (PT. Askrindo) Periode III dan Periode Restrukturisasi November 2021 berdasar SP2D nomor 230191301069860 yang mana akan jatuh tempo pembayaran PNBP-nya maksimal 15 hari kerja setelah diterimanya pembayaran subsidi IJP (tanggal dokumen SP2D). Sampai dengan 31 Desember 2023, PNBP dimaksud belum sampai pada waktu jatuh tempo maksimal dan belum dibayarkan oleh PT. Askrindo:
3. BA 999.07, Pendapatan Yang Harus Diterima per 31 Desember 2023 sebesar Rp121.971.643.394. Jumlah Pendapatan Yang Harus Diterima tersebut, Rp120.437.333.173 (7.849,61%) lebih besar dari Jumlah Pendapatan Yang Harus Diterima per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.534.310.221. Pendapatan Yang Harus Diterima per 31 Desember 2023 terdapat pada:
   a. Kementerian Pertanian

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp52.190.709 dan Rp52.190.709.

Saldo per 31 Desember 2023 Pendapatan yang Masih Harus Diterima berada pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian senilai Rp52.190.709 merupakan kelebihan pembayaran belanja subsidi pupuk kepada PT. Pupuk Kalimantan Timur TA.2020 berdasarkan koreksi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor R.470/PW.110/G.3/12/2022 untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI AKN IV yang sebelumnya senilai Rp68.201.630.133.

b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Saldo per 31 Desember 2023 Pendapatan yang Masih Harus Diterima berada pada Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan senilai Rp306.060.315. Nilai tersebut diperoleh karena adanya koreksi atas lebih bayar pada 34 debitur yang terdampak di TA 2023 sebesar Rp117.498.112 dan TA 2022 sebesar Rp116.217.117, kemudian terdapat 96 debitur yang telah dilunasi klaim asuransinya dari asuradur senilai total Rp72.345.086.

c. Kementerian Koperasi dan UMKM

Saldo per 31 Desember 2023 Pendapatan yang Masih Harus Diterima berada pada Deputi Bidang Usaha Mikro senilai Rp121.613.392.370. Nilai tersebut diperoleh karena adanya koreksi penyajian atas lebih bayar subsidi bunga/margin KUR atas periode 2023 dan 2022.

4. BA 999.08, Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp675.985.479.244, terjadi penurunan sebesar Rp675.985.479.244 atau 100%. Penurunan ini disebabkan adanya koreksi atas kelebihan pembayaran berdasarkan surat Direktur Utama PT PLN (Persero) nomor 30834/KEU.01.07/F01000000/2023 tanggal 7 Juni 2023 hal Penyelesaian Kelebihan Bayar Kompensasi Tahun 2021 dan Pembayaran Sisa Kompensasi Tahun 2022. Atas kelebihan pembayaran kompensasi tarif tenaga listrik tersebut telah di-set off dengan pembayaran kompensasi di periode Semester I tahun 2023 sebesar Rp675.985.479.244 sehingga saldo akhir menjadi Rp0. Saldo ini terdapat pada satker Dana Kompensasi yang merupakan pengakuan Piutang atas kelebihan pembayaran.

5. BA 999.99, Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp992.771.132.410 dan Rp598.285.298.763 atau mengalami kenaikan sebesar Rp394.485.833.647 (65,94%). Pendapatan yang masih harus diterima berasal dari:

   a. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.202.433.834 dan Rp1.664.858.473. Pendapatan yang masih harus diterima berasal dari kewajiban pembayaran ke kas negara atas Transfer BMN Hulu Migas antar KKKS;

   b. Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp893.433.077.141 dan Rp596.620.440.290. Jumlah tersebut merupakan SBP Triwulan I TA 2024 (atas hasil usaha Panas Bumi periode IV Tahun 2023) yang akan diterima pada bulan Januari 2024 namun belum dapat diakui sebagai pendapatan pada Tahun 2023;

   c. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp97.135.621.435 dan Rp0. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima tersebut terdapat pada satker transaksi khusus pengelola kas Negara yang berasal dari pengakuan

pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Umum (BUMPUN) bulan Desember 2023 sebesar Rp4.755.068.492, pengakuan pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling bulan Desember 2023 yang akan diterima pada bulan Januari 2024 senilai Rp43.686.237.472 (Rp47.387.690.327 dikurangi dengan Koreksi atas bagian pendapatan TNP yang termasuk pendapatan TDF senilai Rp3.701.452.855), dan pengakuan pendapatan atas pengelolaan Rekening Khusus (Reksus) Pinjaman dan/atau hibah bulan Desember 2023 yang diterima pada bulan Januari 2024 sebesar Rp48.694.315.471.

D.2.1.1.14. PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp241.872.476.098.171 dan Rp241.374.054.869.037 atau mengalami kenaikan sebesar Rp498.421.229.134 (0,21%). Piutang Bukan Pajak tersebut merupakan piutang pada Piutang Bukan Pajak Investasi Pemerintah (BA 999.03), Transfer Ke Daerah (BA 999.05), Belanja Subsidi (BA 999.07), Belanja Lain-Lain (BA 999.08) dan Transaksi Khusus (BA 999.99).

Piutang tersebut merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran serta diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Piutang Bukan Pajak ini terdiri dari:

(dalam Rupiah)

No.	Debitur	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Piutang Dividen (BA 999.03)	49.577.182.163	56.554.713.538
2.	Piutang Transfer ke Daerah (BA 999.05)	12.892.897.399.321	10.194.543.595.109
3.	Piutang Subsidi (BA 999.07)	12.350.000.000	12.350.000.000
4.	Piutang Belanja Lain-lain (BA 999.08)	310.101.704.547	304.815.087.684
5.	Piutang PNBP (BA 999.99)	228.607.549.812.140	230.805.791.472.706
Jumlah		**241.872.476.098.171**	**241.374.054.869.037**

D.2.1.1.14.1. Piutang Dividen (BA 999.03)

Piutang Negara Bukan Pajak (Laba BUMN) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp49.577.182.163 dan Rp56.554.713.538, mengalami penurunan sebesar Rp6.977.531.375 (12,34%).

Perubahan saldo piutang negara bukan pajak per 31 Desember 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

a. Saldo piutang negara bukan pajak pada tanggal 1 Januari 2023 sebesar Rp56.554.713.538 yang terdiri dari pokok dividen sebesar Rp23.826.578.448 dan denda sebesar Rp32.728.135.090. Saldo piutang tersebut berasal dari 6 BUMN dari piutang tahun buku sebelum tahun 2022 (1972-2004).

b. Terdapat pembayaran Piutang Negara Bukan Pajak dari Bagian Pemerintah dari pembagian dividen secara tunai sebelum TB 2022 sebesar Rp6.977.531.375 yang berasal dari PT

Inhutani V (TB 1999) sebesar Rp529.131.000 dan PT Perkebunan Nusantara II (TB 1999) sebesar Rp6.448.400.375.

c. Dengan demikian, Piutang Negara Bukan Pajak (Bagian Pemerintah dari pembagian dividen secara tunai) per tanggal 31 Desember 2023 tercatat menjadi sebesar Rp49.577.182.163 yang terdiri dari pokok dividen sebesar Rp23.826.578.448 dan denda sebesar Rp25.750.603.715.

Rincian Piutang PNBP Dividen dan Denda dapat dilihat pada lampiran LD8.

D.2.1.1.14.2. Piutang Transfer ke Daerah (BA 999.05)

Piutang Transfer ke Daerah BA 999.05 per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp12.892.897.399.321 dan Rp10.194.543.595.109 atau mengalami kenaikan sebesar Rp2.698.353.804.212 (26,47%). Penurunan nilai aset terjadi karena adanya penyelesaian piutang DBH, DAK Non Fisik ,DK DIY, Dana Desa dan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima serta belum ada pengakuan Piutang TKD Diestimasi. Aset yang disajikan dalam Neraca TA 2023 terdiri atas Piutang Transfer ke Daerah sebagaimana rincian berikut:

(dalam Rupiah)

No	Rincian Piutang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Piutang DBH	6.370.424.360.396	5.130.764.211.892
2.	Piutang DAK Non Fisik	4.103.787.260.228	3.393.625.091.684
3.	Piutang DK DIY	23.842.547.568	47.274.190.776
4.	Piutang Dana Desa	2.188.819.277	6.663.568.678
5.	Piutang DBH Diestimasi	2.392.654.411.852	1.616.216.532.079
	Total	**12.892.897.399.321**	**10.194.543.595.109**

Rincian Piutang DBH, DAK Non Fisik dan DK DIY dapat dilihat pada lampiran LD8b.

1. Piutang DBH

Piutang Transfer Dana Perimbangan Per TA 2023 tercatat sebesar Rp6.370.424.360.396 mengalami kenaikan Rp1.239.660.148.504 atau 24,16% dari 31 Desember TA 2022.

Piutang DBH yang dicatat dalam Laporan Keuangan Transfer ke Daerah meliputi seluruh hak Pemerintah Pusat atas lebih bayar transfer yang terjadi pada tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran sebelumnya. Piutang atas lebih bayar tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan No.90 Tahun 2023. PMK tersebut merupakan PMK penetapan kembali atas saldo Lebih Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2023.

Saldo Piutang Transfer Dana Perimbangan Per 31 Desember TA 2022 tercatat sebesar Rp5.130.764.211.892. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH Pada Tahun 2023, PMK dimaksud menetapkan kembali besaran piutang DBH sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp12.331.249.604.396 dan menetapkan Lebih Bayar DBH tahun 2023 sebesar Rp6.370.424.360.396.

Berikutnya Kementerian Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK Nomor 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2023, melalui KMK dimaksud dilakukan penyelesaian Lebih Bayar sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp5.960.825.244.000. Sehingga sisa saldo Lebih Bayar TA 2023 menjadi Rp6.370.424.360.396.

Rincian sisa Saldo Piutang transfer DBH sebagai berikut:

Uraian	Sisa Saldo Lebih Bayar Tahun 2023 (Rp)
LB Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	178.019.945.467
LB Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	1.297.564.724.768
LB Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi	8.768.900.653
LB Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/Kota	56.379.033.037
LB Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan Sama Rata ke Kabupaten/Kota	19.062.444.299
LB Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	94.734.905.647
LB Dana Bagi Hasil Gas Bumi	339.559.406.068
LB Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	112.186.640.258
LB Dana Bagi Hasil Pertambangan UmumIuran Tetap	302.921.877.470
LB Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumiluran Produksi (Royalti)	7.463.692.536
LB Dana Bagi Hasil Perikanan	168.823.453.961
LB Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	128.594.386.517
LB Dana Bagi Hasil KehutananPSDH	169.637.901.501
LB Dana Bagi Hasil Pertambangan UmumRoyalti	3.155.669.570.928
LB Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumiluran Tetap	8.403.289.024
LB Transfer Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	43.633.212.438
LB Dana Bagi Hasil Gas Bumi 0.5%	14.970.726.050
LB Dana Bagi Hasil Minyak Bumi 0.5%	14.601.496.729
LB Dana Bagi Hasil KehutananIIUPH/IHPH	75.388.355.310
LB Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas BumiSetoran Bagian Pemerintah	2.008.737.242
LB Dana Bagi Hasil KehutananDana Reboisasi	58.441.230.493
LB Tambahan Dana Bagi Hasil Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus	61.782.650.209
LB Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus	51.807.779.791
Total	**6.370.424.360.396**

Rincian Sisa Saldo Piutang Transfer DBH (dalam Rp)

No.	Transaksi	Jumlah
a.	Piutang DBH TA 2022 Audited	5.130.764.211.892
b.	Penetapan Piutang tambahan DBH SDA Kehutanan TA 2021 berdasarkan PMK 90/PMK.07/2023	1.481.079.852
c.	Penetapan Piutang DBH TA 2022 berdasarkan PMK 90/PMK.07/2023	7.199.004.312.652
d.	Penyelesaian Piutang DBH sampai dengan TA 2021 berdasarkan KMK 38/KM.7/2023	(4.047.393.991.000)
e.	Penyelesaian Piutang DBH TA 2022 berdasarkan KMK 38/KM.7/2023	(1.913.431.253.000)
Total		**6.370.424.360.396**

2. Piutang Satker DAK Non Fisik

Aset Lancar per 31 Desember 2023 Transfer DAK Nonfisik sebesar Rp4.103.787.260.228. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp710.162.168.544 atau 20,93% bila dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2022 sebesar Rp3.393.625.091.684. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya pengakuan piutang DAK Nonfisik.

No.	Transaksi	Jumlah
a.	Piutang DAK Nonfisik TA 2022 Audited	3.393.625.091.684
b.	Penyelesaian piutang bukan pajak oleh Pemda melalui Pemotongan atas Penyaluran DAK Non Fisik	(2.057.843.470.325)
	i. Penyesuaian Piutang Dana BOSP berdasarkan nota dinas rekomendasi penyaluran Dana BOSP Tahap I Gelombang 3 dan 4	(234.320.213.685)
	ii. Penyesuaian Piutang DAK Nonfisik berdasarkan nota dinas rekomendasi penyaluran DAK Nonfisik lainnya	(1.823.523.256.640)
c.	Koreksi atas DAK Non Fisik – TKG TA 2023 dan DAK Non Fisik atas Dana BOSP TA	2.124.497.361.237
d.	Pengakuan piutang DAK Non Fisik setelah Audited 2022	574.332.524.550
e.	Penyelesaian Piutang DAK Non Fisik TA 2022	(2.985.140.132.140)
f.	Pengakuan Piutang DAK Non Fisik TA 2023 per 31 Desember 2023	3.147.018.641.485
g.	Penyelesaian piutang atas lebih salur DAK non Fisik TA 2023	(92.702.756.263)
Total		**4.103.787.260.228**

a. Saldo awal sebesar Rp3.393.625.091.684 merupakan saldo piutang dana DAK Non Fisik berdasarkan LKTD Audited 2022. Rincian saldo piutang DAK Non Fisik tersebut sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

No.	Jenis Dana	Saldo Piutang DAK Nonfisik
i.	Dana BOS	230.549.770.420
ii.	Dana BOP PAUD	3.226.246.621
iii.	Dana BOP Kesetaraan	1.698.837.403
iv.	Dana TPG ASND	457.838.287.837
v.	Dana TKG ASND	120.945.677.770
vi.	Dana Tamsil Guru ASND	199.428.417.148
vii.	Dana BOK	1.632.014.160.458
viii.	Dana BOKB	543.789.870.167
ix.	Dana PK2UMK	14.189.188.386
x.	Dana Pelayanan Adminduk	53.519.220.386
xi.	Dana Pelayanan Kepariwisataan	17.306.079.825
xii.	Dana BOP Museum dan Taman Budaya	10.947.024.799
xiii.	Dana Bantuan Layanan Pengelolaan Sampah	148.405
xiv.	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	42.476.705.370
xv.	Dana Fasilitas Penanaman Modal	28.229.322.227
xvi.	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	11.680.531.299
xvii.	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	25.785.603.163
Total		**3.393.625.091.684**

b. Dalam Tahun 2023 terdapat penyelesaian Piutang Bukan Pajak oleh Pemda melalui pemotongan penyaluran TKD TA 2023 yaitu Pemotongan atas penyaluran DAK Nonfisik sebesar Rp2.057.843.470.325. Nilai sebesar Rp2.057.843.470.325 terdiri dari pemotongan berdasarkan Nota dinas rekomendasi penyaluran Dana BOSP Tahap I Gelombang 3 dan 4 sebesar

Rp234.320.213.685 dan Nota dinas rekomendasi penyaluran DAK Non Fisik Lainnya (Potongan SPM Akun 425929) sebesar Rp1.823.523.256.640.

c. Koreksi sebesar Rp2.124.497.361.237 merupakan koreksi atas saldo piutang DAK Non Fisik – Tunjangan Khusus Guru TA 2023, DAK Non Fisik Lainnya, dan Dana BOSTP TA 2022.

d. Pengakuan piutang DAK Non Fisik setelah Audited 2022 sebesar Rp574.332.524.550. Nilai ini merupakan sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik di tahun 2022 namun belum diakui sebagai piutang di tahun 2023 berdasarkan nota dinas rekomendasi penyaluran DJPK kepada DJPb selama tahun 2023 dan KMK 29/2023 jo. KMK 35/2023 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 atas Daerah Yang Masih Terdapat Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan TA 2022. Rincian sisa dana per jenis DAK Non Fisik sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini:

No.	Jenis Dana	Sisa Dana
i.	Dana Bantuan Operasional Kesehatan	450.368.056.577
ii.	Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	80.713.120.235
iii.	Dana PK2UMK	1.113.661.130
iv.	Dana Pelayanan kepariwisataan	(1.172.304.939)
v.	Dana BOP Museum dan Taman Budaya	(26.690.126)
vi.	Dana Pelayanan Administrasi dan Kependudukan	(34.030.127.473)
vii.	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.176.079.739
viii.	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.642.082.127
ix.	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	950.424.752
x.	Dana Fasilitas Penanaman Modal	4.208.458.868
xi.	Dana Bantuan Operasional Sekolah	61.090.281.118
xii.	Dana BOP PAUD	4.327.319.521
xiii.	Dana BOP Kesetaraan	972.163.021
Total		**574.332.524.550**

e. Penyelesaian Piutang DAK Non Fisik TA 2022 pada TA 2023 adalah sebesar Rp2.985.140.132.140. Penyelesaian piutang ini diperhitungkan saat dilakukan penyaluran DAK Non Fisik di tahun 2023 ditambah penyelesaian berdasarkan KMK 29/2023 jo. KMK 35/2023. Rincian piutang per jenis DAK non Fisik TA 2022 yang telah diselesaikan piutangnya di tahun 2023 tersaji pada tabel berikut:

No.	Jenis Dana	Penyelesaian Piutang Th 2022
i.	Dana Bantuan Operasional Kesehatan	1.886.135.872.200
ii.	Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	624.411.409.301
iii.	Dana PK2UMK	15.302.849.516
iv.	Dana Pelayanan kepariwisataan	16.121.822.385
v.	Dana BOP Museum dan Taman Budaya	10.920.334.673
vi.	Dana Pelayanan Administrasi dan Kependudukan	19.426.513.390
vii.	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	14.335.883.088
viii.	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	28.427.685.290
ix.	Dana Bantuan Layanan Pengelolaan Sampah	148.405
x.	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	43.321.294.055
xi.	Dana Fasilitas Penanaman Modal	32.358.675.545
xii.	Dana Bantuan Operasional Sekolah	286.057.533.219
xiii.	Dana BOP PAUD	5.918.067.469
xiv.	Dana BOP Kesetaraan	2.402.043.604
Total		**2.985.140.132.140**

f. Terdapat pengakuan Piutang DAK Non Fisik TA 2023 sebesar Rp3.147.018.641.485. Rincian piutang per jenis DAK Non Fisik TA 2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

No.	Jenis Dana	Jumlah Piutang
i.	Belanja Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	991.135.210.575
ii.	Belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan	1.814.234.069.803
iii.	Belanja Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	256.177.874.792
iv.	Belanja Dana Peningkatan Kapasitas Usaha Kecil Menengah	6.443.494.143
v.	Dana Pelayanan Kepariwisataan	6.038.174.469
vi.	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	4.563.960.022
vii.	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	19.078.369.814
viii.	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	14.613.552.138
ix.	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	34.733.935.729
Total		**3.147.018.641.485**

g. Penyelesaian piutang atas lebih salur DAK non Fisik TA 2023 sebesar Rp92.702.756.263. Rincian penyelesaian piutang per jenis DAK Non Fisik TA 2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

No.	Jenis Dana	Jumlah Piutang
i.	Dana Tambahan Penghasilan Guru ASND	61.282.726.113
ii.	Dana Tunjangan Khusus Guru ASND	31.420.030.150
Total		**92.702.756.263**

Tabel berikut menyajikan rincian piutang DAK Non Fisik per jenis dana sampai dengan 31 Desember 2023:

No.	Jenis Dana	Nilai Piutang
i.	Dana TPG ASND	1.448.973.498.412
ii.	Dana TKG ASND	156.179.538.532
iii.	Dana Tamsil Guru ASND	138.145.691.035
iv.	Dana BOK	2.010.480.414.638
v.	Dana BOKB	256.269.455.893
vi.	Dana PK2UMK	6.443.494.143
vii.	Dana Pelayanan Adminduk	62.579.523
viii.	Dana Pelayanan Kepariwisataan	6.050.126.970
ix.	Dana BOP Museum dan Taman Budaya	4.563.960.022
x.	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	19.184.205.881
xi.	Dana Fasilitas Penanaman Modal	14.692.657.688
xii.	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	520.727.950
xiii.	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	34.733.935.729
xiv.	Dana BOS	5.582.518.319
xv.	Dana BOP PAUD	1.635.498.673
xvi.	Dana BOP Kesetaraan	268.956.820
Total		**4.103.787.260.228**

3. Piutang Lebih Salur Satker DK DIY

Piutang transfer ke Daerah DK DIY yang disajikan per 31 Desember 2023 sejumlah Rp23.842.547.568, terjadi penurunan Rp23.431.643.208 atau 49,57% jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 yang juga sebesar Rp47.274.190.776. Hal ini disebabkan karena telah terdapat penyelesaian piutang pada TA 2023 sebesar Rp47.274.190.776 melalui potongan SPM/SP2D penyaluran DK DIY Tahap I TA 2023 dan terdapat pengakuan atas sisa DK DIY di RKUD TAYL pada TA 2023 sebesar Rp23.842.547.568. Pengakuan atas sisa DK DIY di RKUD TAYL pada TA 2023 sebesar Rp23.842.547.568 telah sesuai dengan sisa DK DIY di RKUD pada akhir TA 2023 yang telah diverifikasi dan dituangkan dalam Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan DIY Tahap III Tahun Anggaran 2023.

4. Piutang Dana Desa

Piutang Dana Desa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 ialah sebesar Rp2.188.819.277 dan Rp6.663.568.678 atau menurun sebesar Rp4.474.749.401,00 (67,15%), yang merupakan penyelesaian Piutang oleh Desa melalui pemotongan penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III TA 2023.

5. Piutang DBH Diestimasi

Piutang Transfer DBH Diestimasi per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp2.392.654.411.852, apabila dibandingkan dengan Piutang Transfer DBH Diestimasi Per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.616.216.532.079, Piutang Transfer DBH Diestimasi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp776.437.879.773 atau 48,04%.

Kenaikan Piutang DBH Diestimasi Tahun 2023 merupakan selisih antara realisasi penerimaan negara dan realisasi penyaluran DBH tahun 2023. Kenaikan terbesar atas Piutang DBH Diestimasi adalah DBH Lainnya (DBH Sawit). Rincian saldo akhir piutang DBH Diestimasi per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

Jenis DBH	Saldo Piutang DBH Diestimasi
DBH Pajak	**-**
DBH Sumber Daya Alam	**724.625.188.886**
Kehutanan	133.633.810.366
Panas Bumi	4.868.276.135
Perikanan	586.123.102.385
DBH Lainnya (DBH Sawit)	**1.668.029.222.966**
Total	**2.392.654.411.852**

D.2.1.1.14.3. Piutang Subsidi (BA 999.07)

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.350.000.000. Saldo tersebut terdiri dari Hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca yang berasal dari satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian sebesar Rp12.350.000.000. Piutang ini merupakan sisa kelebihan pembayaran atas Subsidi Benih

oleh PT Sang Hyang Seri. Jumlah Piutang Bukan Pajak tersebut sama dengan Jumlah Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022.

D.2.1.1.14.4. Piutang Belanja Lain-lain (BA 999.08)

Saldo piutang bukan pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp310.101.704.547 dan Rp304.815.087.684 atau mengalami kenaikan sebesar Rp466.177.681 (0,15%). Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Perbandingan piutang bukan pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

(dalam Rupiah)

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2023	31 Desember 2022
059	Kementerian Kominfo	9.097.887.689	12.262.905.762
015	Kementerian Keuangan	6.398.716.692	-
018	Kementerian Pertanian	288.901.122.353	288.901.122.353
999	MPP Kartu Prakerja	5.269.130.000	821.544.690
999	OJK	-	119.223.400
999	SKK Migas	434.847.813	2.710.291.479
Total		**310.101.704.547**	**304.815.087.684**

Piutang bukan pajak tersebut terdapat pada:

1. Kementerian Kominfo, merupakan kelebihan pembayaran bantuan operasional LPU Triwulan IV Tahun 2023 berdasarkan hasil verifikasi Ditjen PPI pada 29 Februari 2024 dimana pembayaran untuk Triwulan IV pada bulan Desember 2023 masih menggunakan dasar prognosa.
2. Kementerian Keuangan, Kanwil DJPB Papua sebesar Rp6.398.716.692, yang merupakan piutang atas pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah akibat pelanggaran kontrak oleh PT Pos Indonesia (persero). Piutang tersebut telah disetor pada tanggal 19 Januari 2024 dengan NTPN: 9D66145KPSB2I7AA.
3. Kementerian Pertanian, Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp288.901.122.353 terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023			31 Desember 2022		
	PT. SHS	PT. Pertani	Jumlah	PT. SHS	PT. Pertani	Jumlah
Piutang CBN	235.312.610.399	36.794.725.767	272.107.336.166	235.312.610.399	36.794.725.767	272.107.336.166
Biaya Distribusi CBN	13.133.698.434	3.698.612.007	16.832.310.441	13.133.698.434	3.698.612.007	16.832.310.441
Temuan LHP CBN	4.700.000.000	-	4.700.000.000	4.700.000.000	-	4.700.000.000
Jasa Giro Dana CBN	(1.039.912.247)	(3.698.612.007)	(4.738.524.254)	(1.039.912.247)	(3.698.612.007)	(4.738.524.254)
Total	**252.106.396.586**	**36.794.725.767**	**288.901.122.353**	**252.106.396.586**	**36.794.725.767**	**288.901.122.353**

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan rincian piutang bukan pajak sebagai berikut:

a. Saldo Piutang CBN merupakan nilai benih CBN per tanggal pelaporan yang masih terdapat pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero). Nilai Piutang CBN per 31 Desember 2023 ini diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Atas Pengelolaan Bagian Anggaran 999.08 Kegiatan

Cadangan Benih Nasional (CBN) Pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan No: R.320/PW.130/G.3/12/2020 tanggal 3 Desember 2020. Nilai Piutang CBN PT. Sang Hyang Seri (Persero) sebesar Rp235.312.610.399 terdiri dari:

1) Persediaan bahan dan pestisida sebesar Rp109.232.000;
2) Uang muka fee pengelolaan CBN sebesar Rp7.608.666.240;
3) Piutang lain-lain untuk relokasi senilai Rp234.096.700;
4) Biaya penyimpanan dan pemeliharaan CBN sebesar Rp4.930.295.737 (sebesar Rp1.041.018.103 pada rekening bank per 31 Desember 2019);
5) Benih yang tidak berada di gudang dan penangkar sebesar Rp222.430.319.722.

Sedangkan untuk nilai piutang CBN pada PT. Pertani (Persero) sebesar Rp36.794.725.767 merupakan benih yang tidak berada di gudang penangkar.

b. Biaya Distribusi CBN merupakan nilai biaya distribusi penyaluran CBN per tanggal pelaporan yg masih terdapat pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) sebesar Rp13.133.698.434 dan PT. Pertani (Persero) sebesar Rp3.698.612.007. Nilai Biaya Distribusi CBN per 31 Desember 2023 ini diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Atas Pengelolaan Bagian Anggaran 999.08 Kegiatan Cadangan Benih Nasional (CBN) Pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan No: R.320/PW.130/G.3/12/2020 tanggal 3 Desember 2020.

c. Saldo Piutang Bukan Pajak Tahun 2016 sebesar Rp4.811.607.957 tersebut merupakan Temuan LHP BPK RI No. 25/LHP/XVII/06/2013 berupa uang muka penyegaran benih CBN pada PT Sang Hyang Seri (Persero) yang harus disetorkan ke Kas Negara. Pada periode TA. 2022 terdapat cicilan pembayaran penyelesaian kewajiban PT. SHS sebesar Rp111.607.957. Sehingga saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.700.000.000.

d. Jasa giro pengelolaan dana CBN pada BUMN pelaksana CBN sebesar Rp4.738.524.254 yang sudah disetorkan ke Kas Negara dengan rincian: 1) PT. Sang Hyang Seri (Persero) sebesar Rp1.039.912.247, merupakan Saldo Induk yang berasal dari biaya penyimpanan dan pemeliharaan CBN; dan 2) PT. Pertani (Persero) sebesar Rp3.698.612.007 merupakan Saldo Induk yang berasal dari biaya distribusi benih yang masih disimpan di rekening bank PT. Pertani (Persero).

4. Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja sebesar Rp5.269.130.000 yang merupakan Pengembalian belanja implementasi pelatihan Program Kartu Prakerja atas temuan dari Direktorat Pemantaun dan Evaluasi MPPKP dan Tuntutan Perbendaharaan atas Rekomendasi Pemeriksaan BPK RI dan Inspektur Kemenko Perekonomian kepada Penyedia Jasa Perorangan yang belum dilakukan pengembalian belanja kepada MPPKP.
5. Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp0 merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian piutang PNBP adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai	-	119.223.400
Jumlah	**-**	**119.223.400**

6. SKK Migas sebesar Rp434.847.813 merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan, namun belum diselesaikan pembayarannya.

D.2.1.1.14.5. Piutang Bukan Pajak (BA 999.99)

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp228.607.549.812.140 dan Rp230.805.791.472.706 atau mengalami penurunan sebesar Rp2.198.241.660.566 (0,95%). Piutang tersebut merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran serta diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Piutang Pada UAPBUN TK DJPB	133.599.138.234	201.917.018.643
Piutang Pada UAPBUN TK DJA	16.892.965.586.621	20.176.468.675.625
Piutang Pada UAPBUN TK DJKN	211.580.985.087.285	210.427.405.778.438
Jumlah	**228.607.549.812.140**	**230.805.791.472.706**

1. Piutang Pada UAPBUN TK DJPB per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp133.599.138.234 dan Rp201.917.018.643. Nilai tersebut merupakan Piutang pada satker transaksi khusus Pensiun sebesar Rp133.599.138.234 yang berasal dari:

   a. Piutang IJP Rampung 2022 sebesar Rp148.000;
   b. Piutang Kelebihan Pencairan Belanja Pensiun Des 23 Asabri sebesar Rp15.945.924.816;
   c. Piutang Jasa Giro Des 23 Asabri sebesar Rp217.027.706;
   d. Piutang Potongan Utang Non TGR (Non Dapem Des 23) sebesar Rp314.335.894;
   e. Piutang Setoran SUP (SUP Bulan Desember dan SUP Retur Desember 2023) sebesar Rp4.538.955.792;
   f. Piutang SUP Retur Des 23 Taspen sebesar Rp13.622.534.947;
   g. Piutang SUP Kompensasi bulan Desember 2023 Taspen sebesar Rp27.740.003.593;
   h. Piutang Kelebihan pencairan belanja pensiun bulan Desember 2023 Taspen sebesar Rp59.298.532.862;
   i. Piutang Setoran Kas Negara Non Dapem dan Susulan bulan Desember 2023 sebesar Rp1.803.720.576;
   j. Piutang Jasa Giro Des 23 Taspen sebesar Rp3.975.559.212;
   k. Kelebihan Pencairan Dana Iuran Jaminan Kesehatan TW IV 23 BPJS sebesar Rp5.282.769.067;
   l. Kelebihan pencairan dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Triwulan IV Tahun 2023 Asabri

sebesar Rp372.704.880;

m. Kelebihan pencairan dana Iuran Jaminan Kematian Triwulan IV Tahun 2023 Asabri sebesar Rp486.920.889.

2. Piutang PNBP UAPBUN TK DJA merupakan Piutang PNBP Sumber Daya Alam periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp16.892.965.586.621 dan Rp20.176.468.675.625 merupakan piutang yang berasal dari kegiatan usaha hulu migas dan panas bumi.

Jumlah tersebut terdiri dari piutang hasil penjualan minyak bumi bagian pemerintah, hasil penjualan gas bumi bagian pemerintah, overlifting KKKS dan piutang PNBP migas lainnya, serta kekurangan setoran bagian pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
			(Rp)	%
Hasil Penjualan Minyak	9.126.643.089.767	10.724.087.642.125	(1.597.444.552.358)	(14,90)
Hasil Penjualan Gas	2.653.801.451.359	4.543.151.240.677	(1.889.349.789.318)	(41,59)
Overlifting KKKS	4.362.688.151.564	3.951.734.539.222	410.953.612.342	10.40
PNBP Migas lainnya	748.416.285.947	957.495.253.601	(209.078.967.654)	(21,84)
Kekurangan Setoran Bagian Pemerintah atas kegiatan usaha panas bumi	1.416.607.984	-	1.416.607.984	100
Total Piutang	**16.892.965.586.621**	**20.176.468.675.625**	**(3.283.503.089.004)**	**(16,27)**

Saldo piutang PNBP Sumber Daya Alam Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.892.965.586.621 adalah lebih rendah Rp3.283.503.089.004 dari posisi per 31 Desember 2022.

Dari saldo piutang PNBP Sumber Daya Alam Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.892.965.586.621 tersebut terdiri dari:

a. Hasil penjualan Minyak atas transaksi lifting Minyak bulan Desember 2023 yang belum jatuh tempo sebesar Rp9.126.643.089.767. Piutang dimaksud umumnya jatuh tempo dan diselesaikan pada bulan Januari 2024.
b. Hasil Penjualan Gas atas transaksi lifting gas bulan Desember 2023 sebesar Rp2.653.801.451.359. Piutang dimaksud umumnya jatuh tempo dan diselesaikan pada bulan Januari 2024.
c. Saldo piutang overlifting per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.362.688.151.564, terdiri dari overlifting estimasi sebesar Rp3.168.997.736.122 dan overlifting definitif sebesar Rp1.193.690.415.443.

Terhadap saldo piutang PNBP Migas Tahun 2023, terdapat saldo piutang overlifting KKKS yang masih belum disepakati dengan KKKS sejumlah USD1.549.916, dengan penjelasan sebagai berikut.

1) Outstanding piutang overlifting yang masih belum disepakati sejumlah USD1,549,916 tersebut berasal dari piutang overlifting KKKS Medco E&P Malaka yang disebabkan ketidakcukupan bagian negara dari gas bumi untuk menutupi sisa kekurangan KKKS

Medco E&P Malaka terkait dengan implementasi kebijakan Harga Bumi Tertentu (HGBT), sehubungan dengan pemberlakuan harga USD6,56/MMBTU dari yang seharusnya menggunakan harga USD7,03/MMBTU;

2) Sehubungan dengan hal tersebut, BPMA telah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM terkait dengan ketidakcukupan bagian negara dari gas bumi untuk menutupi sisa kekurangan Medco E&P Malaka sebagai dampak dari Pengembalian Volume Gas In Kind kepada buyer (PTGN). Salah satu pokok hasil pembahasan, telah disepakati bahwa periode perhitungan harga gas USD6,90/MMBTU dapat berlaku sebelum Kepmen ESDM Nomor 89K/2020 dan Kepmen 91K/2020 ditetapkan. Dengan demikian, perlu dilakukan perhitungan ulang atas pengembalian secara Volume In-Kind dengan mekanisme business-to-business dan tidak melibatkan entitlement bagian negara.

d. Transaksi PNBP Migas Lainnya sebesar Rp748.416.285.947, dari saldo piutang tersebut termasuk di dalamnya sebagai berikut.

1) Piutang atas Bonus Produksi sebesar Rp30.878.000.000;

2) Piutang atas denda keterlambatan penyetoran atas Gas Bumi sebesar Rp139.294.312;

3) Piutang atas DMO sebesar Rp713.835.804.974;

4) Piutang atas transaksi Jasa Pandu Tunda sebesar Rp3.563.186.661.

e. Pada periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, terdapat penagihan atas kekurangan penyetoran bagian pemerintah atas kegiatan usaha panas bumi berdasarkan hasil audit BPKP untuk PT PGE tahun buku 2019-2020 melalui surat tagihan nomor S-330/AG/2023 tanggal 8 Desember 2023 sebesar Rp1.416.607.984.

3. Piutang PNBP UAPBUN TK DJKN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp211.580.985.087.285 dan Rp210.427.405.778.438 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
a.	Sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP	-	-
b.	Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI	211.549.299.194.630	210.404.156.919.609
c.	Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset KKKS	31.685.892.655	23.248.858.829
	TOTAL	**211.580.985.087.285**	**210.427.405.778.438**

a. Piutang yang berasal dari UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina.

Perhitungan sewa aset eks Pertamina pada mulanya didasarkan pada surat Menteri Keuangan Nomor S-23/MK.6/2009 tanggal 23 Januari 2009 yang menjelaskan nilai objek sewa selama 32 Tahun sebesar Rp9.472.807.941.523. Berdasarkan surat tersebut, seluruh BMN eks Pertamina kelompok aset eks KKKS senilai Rp16,2 Triliun yang digunakan oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP disetujui untuk dikenakan biaya sewa, kecuali terhadap aset berupa sumur dan tanah sepanjang merupakan Wilayah Kerja Pertambangan

(WKP).

Selanjutnya, PT Pertamina (Persero) menyampaikan Laporan Inventarisasi Aset Eks Pertamina kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor 194/C00000/2011-S0 tanggal 29 Maret 2011 perihal Sewa Aset Eks Pertamina, yang menerangkan hasil inventarisasi aset eks Pertamina kelompok eks KKKS yang digunakan oleh Pertamina berupa sumur, tanah, peralatan, bangunan, dan aset lainnya, dengan pengelompokan sebagai aset masih digunakan, aset tidak digunakan, aset digunakan anak perusahaan lainnya, aset tidak ditemukan, dan aset dalam proses usul hapus, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah)

Status Aset	Bangunan	Equipment	Lain-Lain	Sumur	Tanah	Grand Total
Digunakan	601.111	5.889.151	140.667	5.404.568	1.741.017	13.776.515
Digunakan Anak Usaha Lain	241	203.899	1.312	-	-	205.452
Proses Usul Hapus	9.366	86.619	519	9.456	2.028	107.989
Tidak Digunakan	103.168	1.161.309	19.121	207.227	449.777	1.940.601
Tidak Ditemukan	11.185	185.587	12.524	1.498	742	211.535
Grand Total	725.071	7.526.566	174.143	5.622.749	2.193.564	16.242.092

SKK Migas melalui suratnya Nomor SRT-1294/SKKO0000/2014/S4 tanggal 30 Desember 2014 menyampaikan kepada Menteri Keuangan bahwa dasar pengenaan sewa adalah BMN eks Pertamina berupa peralatan, bangunan, dan aset lain-lain yang berstatus digunakan sebesar Rp6.630.929.353.338 dengan rincian sebagai berikut:

UNIT	Equipment	Bangunan	Lain-lain	Grand Total
	Masih Digunakan	Masih Digunakan	Masih Digunakan	
Reg Jawa	1.224.326.862.000	102.658.104.000	111.023.870.000	1.438.008.836.000
Kawasan Timur	419.133.095.522	77.183.384.000	15.515.077.000	511.831.556.522
Reg Sumatera	2.855.534.590.000	274.425.208.000	3.673.196.000	3.133.632.994.000
UBEP Adera	116.409.369.551	501.242.000	-	116.910.611.551
Talisman	4.065.030.000	1.780.968.000	-	5.845.998.000
UBEP Jambi	144.393.015.000	71.588.257.000	5.153.085.000	221.134.357.000
UBEP Lirik	293.053.917.000	19.668.524.000	3.103.672.000	315.826.113.000
UBEP Satar	36.711.086.000	13.881.564.267	45.894.000	50.638.544.267
UBEP Limau	234.690.912.000	67.942.000	2.133.534.000	236.892.388.000
UBEP Tanjung	560.833.422.333	39.355.713.665	18.819.000	600.207.954.998
TOTAL	**5.889.151.299.406**	**601.110.906.932**	**140.667.147.000**	**6.630.929.353.338**

Perhitungan Piutang PNBP didasarkan pada Surat Kepala SKK MIGAS Nomor: SRT-1294/SKKO0000/2014/S4 tanggal 30 Desember 2014 hal Sewa Aset Eks Pertamina, yang menyampaikan bahwa dasar pengenaan sewa adalah BMN eks Pertamina berupa equipment, bangunan dan aset lainnya yang digunakan oleh PT Pertamina untuk menunjang kegiatan operasional senilai Rp6.630.929.353.338. Untuk aset yang berupa lahan dan sumur sepanjang merupakan bagian dari Wilayah Kerja Pertambangan dapat dimanfaatkan langsung oleh PT Pertamina (Persero) sesuai kontrak dengan Badan Pelaksana Kegiatan

Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS).

Atas dasar tersebut, SKK Migas menghitung besaran tunggakan biaya sewa Aset eks Pertamina oleh PT Pertamina EP dari bulan September 2003 s.d. Juni 2014 sebesar Rp2.227.577.829.636,98 dan telah dilunasi dengan cara swap off dengan utang subsidi Pemerintah kepada Pertamina pada Tahun 2014 tersebut.

Kemudian, kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan dokumen perjanjian sewa antara Kementerian Keuangan dengan PT Pertamina EP Nomor PRJ-3/MK.6/2016 tanggal 20 September 2016 yang menyatakan objek sewa menyewa adalah BMN yang berasal dari kelompok aset eks KKKS Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina EP berupa fasilitas produksi, bangunan, HBM bergerak, dan aset lain-lain senilai Rp6.630.929.353.338.

PT Pertamina EP telah melakukan penyetoran kembali pada Tahun 2016 sebesar Rp518.041.355.730 sehingga posisi saldo piutang pada Tahun 2016 berdasarkan perhitungan PT Pertamina EP sudah nihil. Pembayaran tersebut dilanjutkan untuk periode tahun-tahun selanjutnya sebesar Rp207.216.542.292 per tahun.

Jumlah BMN Eks Aset Pertamina sebesar Rp6.630.929.353.338 tersebut diperhitungkan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai tarif sewa dengan perhitungan secara prorata untuk jangka waktu 32 (tiga puluh dua) tahun sejak PT Pertamina (Persero) berdiri pada 17 September 2003.

Oleh karena itu, maka tarif sewa untuk penggunaan BMN Eks Aset Pertamina adalah sebesar Rp6.630.929.353.338: 384 bulan =Rp17.268.045.191 per bulan.

Perhitungan Piutang PNBP untuk sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP hingga Tahun 2021 sebesar Rp1.176.715.352.919, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Mutasi Piutang PNBP	Nilai (Rp)
Saldo 1 Januari 2023	**-**
Mutasi Tambah:	**207.216.542.292**
Penggunaan sewa oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP selama Tahun 2023	207.216.542.292
Mutasi Kurang:	**207.216.542.292**
Pembayaran sewa oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP selama Tahun 2023	207.216.542.292
Saldo 31 Desember 2023	**-**

Adapun progres sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut:

1) Terhadap selisih aset dengan nilai sebesar Rp2.841.878.588.184, sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2015, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah melakukan tindak lanjut dengan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi aset lanjutan berupa penelitian lapangan antara DJKN, PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP sebagaimana Berita Acara Rekonsiliasi BA-01/KN.3/REKON.PEP/2015 antara DJKN dengan Pertamina EP dengan hasil Jumlah aset bangunan, equipment, dan

aset lainnya sebesar Rp8,425 Triliun, digunakan sebanyak Rp6,63 Triliun, dan aset yang tidak digunakan sebesar Rp1,794 Triliun.

2) Berdasarkan hasil Rekonsiliasi tahun 2015 di atas, dilakukan pemetaan atas aset Rp1,794 Triliun dalam rangka verifikasi atas aset yang benar-benar tidak digunakan.

3) Berdasarkan Berita Acara Pemetaan antara Dit KND dan PT Pertamina EP tahun 2016 s.d. 2020, telah selesai dilaksanakan pemetaan terhadap selisih aset yang memerlukan klarifikasi sebanyak 13.218 unit dengan nilai Rp1,79 triliun dan diperoleh penambahan nilai aset yang menjadi objek sewa sebesar Rp612.413.874.473.

4) Oleh karena itu besaran sewa BMN Eks Pertamina yang perlu dibayar oleh PT Pertamina EP selama 32 (tiga puluh dua) tahun setelah ditambahkan hasil pemetaan adalah sebesar Rp7.243.343.227.811 (Rp6.630.929.353.338+Rp612.413.874.473). Sehingga besaran sewa BMN eks Pertamina yang harus dibayarkan per tahun setelah diperhitungkan hasil pemetaan adalah Rp226.354.475.869

5) Realisasi biaya sewa yang telah dibayarkan oleh PT PEP mulai periode September 2003 s.d. Desember 2021 (jangka waktu 219 bulan = 18,25 tahun) adalah sebesar Rp3.781.701.896.827 (tiga triliun tujuh ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah)

6) Adapun perhitungan sewa yang seharusnya dibayarkan oleh PT Pertamina EP dengan menggunakan tarif sewa setelah pemetaan untuk periode dari September 2003 s.d. Desember 2021 = Rp4.130.969.184.609 (Rp226.354.475.869 x 18,25 tahun), sehingga, kekurangan sewa yang belum dibayar PT Pertamina EP sebesar = Rp349.267.287.782 (Rp4.130.969.184.609 - Rp3.781.701.896.827).

7) Berdasarkan perhitungan di atas, maka terdapat perubahan besaran Piutang Sewa BMN eks Pertamina dari semula Rp1.176.715.352.919 menjadi Rp349.267.287.782.

8) Berdasarkan hal tersebut telah disampaikan surat kepada Pertamina EP Nomor S-514/KN.5/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Konfirmasi Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina dan Nomor S-2329/KN.5/2021 tanggal 18 November 2021 perihal Penyesuaian Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina Oleh PT Pertamina EP yang intinya menyampaikan kekurangan sewa yang harus dibayar oleh PT Pertamina setelah adanya pemetaan.

9) PT Pertamina menyampaikan tanggapan melalui surat Nomor 0169/PEP00000/2021-S0 tanggal 20 April 2021 sebagai berikut:

   a) Pada saat melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Kegiatan Operasional Perusahaan Dalam Rangka Pengelolaan Hulu Migas Tahun 2017 s.d Semester I 2019 pada Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaan terkait, BPK RI mengeluarkan rekomendasi agar hasil Physical Check BMN Pertamina diteruskan kepada pihak terkait yaitu PT Pertamina (Persero) dan DJKN Kemenkeu. BPK menyampaikan bahwa Pertamina EP berpotensi menanggung biaya pembayaran

sewa yang lebih besar dari yang seharusnya karena tidak segera mengajukan pemutakhiran daftar BMN aset Eks Pertamina sebagai dasar peninjauan kembali perhitungan biaya sewa BMN.

b) Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi BPK dimaksud, PT Pertamina EP menyampaikan Hasil Physical Check Aset 2019 sebagai berikut:

Kelas Aset	Digunakan	Tidak Digunakan	Total
Objek Sewa			
Bangunan	502.296.425.065	98.814.481.867	601.110.906.932
Equipment	4.157.250.251.287	1.731.901.048.119	5.889.151.299.406
Lain-lain	94.463.625.000	46.203.522.000	140.667.147.000
Subtotal Objek Sewa	4.754.010.301.352	1.876.919.051.986	6.630.929.353.338

c) Berdasarkan hasil PCA 2019 tersebut, aset yang digunakan oleh PT Pertamina EP tidak lagi sebesar Rp6.630.929.353.338, melainkan sebesar Rp4.754.010.301.352.

10) Menindaklanjuti hal tersebut, telah dilakukan pembahasan bersama dengan PT Pertamina EP sebanyak dua kali dan disepakati untuk dilakukan pembahasan lanjutan dengan melibatkan pihak lain yang terkait.

11) Selanjutnya, terkait dengan koreksi besaran Piutang Sewa BMN eks Pertamina dari semula Rp1.176.715.352.919 menjadi Rp349.267.287.782 pada laporan keuangan, telah dimintakan permintaan pendapat melalui nota dinas Direktur PKNSI Nomor 2755/KN.5/2021 tanggal 17 November 2021 kepada Inspektorat IV dan Nomor 2756/KN.5/2021 tanggal 17 November 2021 kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yang pada intinya meminta pendapat apakah surat kepada Pertamina EP perihal Penyesuaian Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina dapat dijadikan dasar untuk dilakukan koreksi piutang.

12) Menanggapi permintaan pendapat tersebut, Inspektorat IV berpendapat agar Dit. PKNSI segera melakukan pembahasan dengan PT. Pertamina EP untuk menyepakati hasil proses identifikasi dan verifikasi atas BMN yang dimanfaatkan dan menyusun perjanjian pemanfaatan BMN berdasarkan hasil kesepakatan dengan PT. Pertamina EP. Mengingat Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 16 Akuntansi Piutang Berbasis Akrual mengatur pencatatan piutang pemanfaatan BMN pada neraca berdasarkan naskah perjanjian sewa.

13) Sehubungan dengan adanya perbedaan Penghitungan Besaran Dasar Sewa Aset Eks Pertamina, telah dilakukan rapat via Zoom antara DJKN dengan Pihak PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP pada tanggal 24 April 2022, dimana berkaitan dengan adanya perbedaan besaran tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk kembali kepada angka dasar sewa sesuai kesepakatan semula yaitu sebesar Rp6.630.929.353.338, dan akan dilakukan koordinasi di internal kedua belah pihak.

14) Telah dilakukan penandatanganan perjanjian sewa antara Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Direktur Utama PT Pertamina EP Nomor PRJ-1/MK.6/2022 Nomor 001/PEP00000/2022-S0 tanggal 27 Desember 2022. Dengan adanya kesepakatan perjanjian sewa tersebut dimana menggunakan angka dasar sewa sebesar Rp6.630.929.353.338 dengan jangka waktu perjanjian sewa selama 32 (tiga puluh dua) tahun terhitung sejak tanggal 17 September 2003 dan berakhir tanggal 16 September 2035, maka piutang yang timbul karena adanya selisih pengenaan angka dasar sewa dilakukan koreksi dari semula Rp1.176.715.352.919 menjadi Rp0.

15) Mengingat telah disepakati angka dasar sewa sebesar Rp6.630.929.353.338. Oleh karena itu, maka tarif sewa untuk penggunaan BMN Eks Aset Pertamina adalah sebesar Rp6.630.929.353.338: 384 bulan =Rp 17.268.045.191 per bulan atau Rp207.216.542.292 per tahun atau Rp103.608.271.146 per semester. Pada 31 Desember 2023 PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP telah melakukan penyetoran ke negara sebesar Rp207.216.542.292, sehingga piutang PNBP sampai dengan 31 Desember 2023 Tahun 2023 adalah Rp0.

b. Piutang Bukan Pajak Aset Eks BLBI

Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp211.549.299.194.630 dan Rp210.404.156.919.609 yang terdiri dari:

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Kredit eks BPPN	103.094.434.266.065	100.403.046.368.539
Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA	98.650.243.861.984	100.060.644.793.342
Piutang BDL	9.804.621.066.581	9.940.465.757.728
Jumlah	**211.549.299.194.630**	**210.404.156.919.609**

1) Aset Kredit Eks BPPN

Aset kredit eks BPPN yang dilaporkan di Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp103.094.434.266.065 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp100.403.046.368.539, atau terjadi penambahan piutang pada Aset Kredit eks BPPN sebesar Rp2.691.387.897.526.

Adapun rincian Aset Kredit Eks BPPN sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Saldo 31 Desember 2022
1	Aset kredit yang telah diserahkan pengurusan piutang negaranya kepada PUPN (ATK serta Non ATK yang telah melalui tahap PB/PJPN)	43.279.078.895.965	37.947.642.314.451
2	Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)	34.016.836.940.477	30.470.191.881.578
3	Aset kredit ATK yang masih dikelola DJKN	23.138.424.009.605	29.321.077.942.229
4	Aset Kredit ATK Lainnya	2.660.094.420.018	2.664.134.230.281
	Jumlah	**103.094.434.266.065**	**100.403.046.368.539**

Rincian lebih lanjut terkait Aset Kredit yang berasal dari Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham disajikan lebih lanjut pada Pengungkapan Penting Lainnya.

Rincian lebih lanjut terkait Aset Kredit dilihat di lampiran LD9.

2) Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA (Persero)

Aset kredit eks kelolaan PT PPA (Persero) adalah hak tagih atau piutang eks BPPN yang semula diserahkelolakan kepada PT PPA (Persero) yang kemudian setelah berakhirnya masa perjanjian pengelolaan aset dikembalikan oleh PT PPA (Persero) kepada Menteri Keuangan sesuai Berita Acara Serah Terima tertanggal 27 Februari 2009 dan tidak diserahkelolakan kembali oleh Menteri Keuangan kepada PT PPA (Persero).

Pengelolaan Aset Kredit eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dilakukan dengan cara menyerahkan pengurusan/penagihan aset kredit dimaksud kepada PUPN.

Nilai Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA (Persero) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp98.650.243.861.984 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp100.060.644.793.342 atau terjadi penurunan nilai Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA (Persero) sebesar Rp1.410.400.931.358. Detil dapat dilihat pada lampiran LD10.

Adapun rincian Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA (Persero) sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Saldo 31 Desember 2022
1.	Aset kredit yang telah diserahkan kepada PUPN	96.097.715.704.311	96.752.034.799.881
2.	Aset kredit yang masih dikelola DJKN	2.552.528.157.673	3.308.609.993.461
	Jumlah	**98.650.243.861.984**	**100.060.644.793.342**

3) Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi

Piutang eks BDL per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.804.621.066.581 dan Rp9.940.465.757.727, atau terjadi penurunan Piutang eks BDL sebesar Rp135.844.691.146.

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Eks Dana Talangan	7.563.499.414.004	7.679.238.031.883
2	Eks Dana Penjaminan	2.241.121.652.577	2.261.227.725.844
	Jumlah	**9.804.621.066.581**	**9.940.465.757.727**

Penurunan nilai Piutang eks BDL dikarenakan pembayaran/penyelesaian atas aset kredit eks BDL yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN dan pencairan deviden atas saham eks BDL yang telah jatuh tempo pada tahun 2023. Rincian tersebut dapat dilihat pada lampiran LD11.

c. Piutang Bukan Pajak pada satker TK DJKN Pengelola aset KKKS

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar sebesar Rp31.685.892.655 dan Rp23.248.858.829 yang semula tercatat pada akun piutang lain-lain. Piutang Lain-Lain merupakan piutang terhadap pemanfaatan sewa BMN yang berasal dari

KKKS oleh Pihak lain yang belum dibayarkan ke kas Negara dan piutang terhadap transfer antar KKKS yang telah melebihi periode 1 tahun dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pihak Ketiga	Jumlah per 31 Desember 2023	
			USD	Rp
1	Sewa pada KKKS - Job Pertamina Petrochina East Java*	PT. Pertamina (Persero)	1,413,347	21.820.658.929
2	Sewa pada KKKS - Job Pertamina Petrochina East Java*	PT. Pertamina (Persero)	68,393	1.055.911.808
3	Sewa pada KKKS - Conocophillips Indonesia Inc,Ltd	Perusda Anambas Sejahtera	-	145.582.002
4	Sewa pada KKKS – PT Pertamina Hulu Rokan	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cab. Duri	-	284.274.916
5	Sewa pada KKKS – PT Pertamina Hulu Rokan	Yayasan Lembaga Pendidikan Islam	-	1.999.695.000
6	Sewa pada KKKS – PT Pertamina Hulu Rokan	PT. Mandau Cipta Tenaga Nusantara	-	6.379.770.000
Jumlah				**31.685.892.655**

*Kurs konversi mata uang sesuai JISDOR 31 Desember 2023 (Rp15.439)

D.2.1.1.15. BAGIAN LANCAR PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp7.506.739.181.179 dan Rp7.695.816.466.255, atau mengalami penurunan sebesar Rp189.077.285.076 (2,46%). Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang terdiri dari:

No.	Debitur	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang (BA.999.03)	33.500.000.000	27.000.000.000
2.	Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang (BA 999.99)	7.473.239.181.179	7.668.816.466.255
Jumlah		**7.506.739.181.179**	**7.695.816.466.255**

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya BA 999.03 sebesar Rp33.500.000.000 merupakan bagian dari piutang atas tunggakan Dana Pembangunan Semesta (DPS) Perum Perumnas dengan total tunggakan per 31 Desember 2023 sebesar Rp58.225.637.648. Total Piutang atas Perum Perumnas sebesar Rp58.225.637.648 tersebut dicatat pada dua akun pada LKBUN, yaitu pada akun Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp33.500.000.000 dan pada akun Piutang Jangka Panjang sebesar Rp24.725.637.648. Piutang yang jatuh tempo setahun ke depan dan piutang tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dicatat pada akun Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya. Sedangkan piutang selain piutang yang jatuh tempo setahun ke depan dicatat pada akun Piutang Jangka Panjang.

Rincian Bagian Lancar Piutang jangka Panjang Lainnya BA 999.03 Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya Perumnas	Jatuh Tempo				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angsuran yang Ditetapkan	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
Pembayaran sd 2023	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-
Kurang bayar	6.500.000.000	6.500.000.000	6.500.000.000	6.500.000.000	7.500.000.000

Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang Lainnya BA 999.99 sebesar Rp7.473.239.181.179 terdiri dari:

1. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

   Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.724.239.754.924 dan Rp2.872.754.606.409, atau mengalami penurunan sebesar Rp148.514.851.485 (5,17%). Penurunan tersebut disebabkan karena adanya penyetoran kepada rekening pemerintah sebesar Rp148.514.851.485, dan telah mengakui pembayaran itu sebagai pengurang saldo piutang namun belum mengklasifikasikan pembayaran tersebut sebagai pelunasan pokok, bunga maupun denda. Sehingga rincian Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo adalah sebagai berikut:

   (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	773.382.049.559	773.382.049.559
Bunga	275.324.009.644	275.324.009.644
Denda	1.829.048.547.206	1.829.048.547.206
Pembiayaan	(153.514.851.485)	(5.000.000.000)
Jumlah	**2.724.239.754.924**	**2.872.754.606.409**

   Piutang Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo telah menjadi kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sesuai dengan Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-53/KN/2023 tentang Penyerahan Pengurusan Piutang Negara Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo (DALS) a.n Lapindo Brantas, Inc, PT Minarak Lapindo Jaya dan Nirwan Bakrie. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Penyerah Piutang menghentikan pembebanan bunga, denda, ongkos/biaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat pengurusan Piutang Negara diserahkan kepada PUPN.

2. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya kepada Yayasan Supersemar

   Bagian Lancar Piutang jangka panjang Yayasan Supersemar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp4.748.999.426.255 dan Rp4.796.061.859.846, atau mengalami penurunan sebesar Rp47.062.433.591 (0,98%). Penurunan berasal perubahan kurs per tanggal 31 Desember 2023 (dari Rp15.592 menjadi Rp15.439) dari saldo piutang sebesar USD307.597.605,17 (selisih terjadi karena pembulatan).

   Dengan adanya perubahan kurs per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.439, maka saldo piutang per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Piutang per 31 Desember 2023	
Dalam mata uang asing (USD)	307.597.605,17
Kurs tengah	15.439
Konversi (Rp)	4.748.999.426.255
Saldo Piutang per 31 Desember 2023	**4.748.999.426.255**

Piutang kepada Yayasan Supersemar merupakan piutang yang timbul sebagai akibat dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata antara Negara Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia melawan Yayasan Beasiswa Supersemar sebagaimana telah diputuskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 140/PK/Pdt/2015 tanggal 8 Juli 2015.

D.2.1.1.16. BAGIAN LANCAR PIUTANG PEMBERIAN PINJAMAN

Jumlah Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp20.910.716.095.280 dan Rp23.717.712.129.347 mengalami penurunan sebesar Rp2.806.996.034.067 (11,84%). Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman meliputi Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman, Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman, dan Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman untuk Penyesuaian Akrual. Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2023 terdiri dari:

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	12.335.896.343.702	13.243.361.172.791
2.	Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman	8.140.563.689.625	10.028.553.279.479
3.	Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman untuk Penyesuaian Akrual	434.256.061.953	445.797.677.077
Jumlah		**20.910.716.095.280**	**23.717.712.129.347**

D.2.1.1.17. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH PIUTANG BUKAN PAJAK

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp221.131.800.263.552 dan Rp222.683.814.334.009 mengalami penurunan sebesar Rp1.552.014.070.457 (0,70%). Rincian perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Penyisihan Piutang Dividen (BA 999.03)	69.727.182.163	70.054.713.538
2.	Penyisihan Piutang Pemberian Pinjaman (BA 999.04)	12.914.325.478.458	13.005.909.661.729
3.	Penyisihan Piutang Subsidi (BA 999.07)	12.350.000.000	6.175.000.000
4.	Penyisihan Piutang Belanja Lain-lain (BA 999.08)	289.642.082.960	1.737.684.276
5.	Penyisihan Piutang Migas dan BLBI (BA 999.99)	207.845.755.519.971	209.599.937.274.466
Jumlah		**221.131.800.263.552**	**222.683.814.334.009**

D.2.1.1.17.1. Penyisihan Piutang Dividen (BA 999.03)

Perhitungan Penyisihan Piutang Bukan Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019.

Nilai Penyisihan Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp69.727.182.163, yang terdiri dari:

1. Penyisihan Piutang Bukan Pajak atas piutang dividen sebelum TB 2022 sebesar Rp49.577.182.163 yang merupakan penyisihan piutang dividen tahun 2022 (1972-2004) dengan kualitas Macet pada 6 BUMN;
2. Penyisihan atas restrukturisasi Piutang Dana Pembangunan Semesta (DPS) Perum Perumnas sebesar Rp20.150.000.000.

Pada tahun 2023, terdapat koreksi bahwa nilai pelunasan bukan merupakan pengurang nilai piutang TB 2020 melainkan dihitung sebagai pengurang nilai piutang tahun berjalan. Sehingga penyisihan atas saldo piutang bukan pajak lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Nilai Angsuran Restrukturisasi	Pembayaran	Bagian Lancar	% Penyisihan	Status Piutang	Nilai Penyisihan
2020	7.500.000.000	1.000.000.000	6.500.000.000	100%	Macet	6.500.000.000
2021	7.500.000.000	1.000.000.000	6.500.000.000	100%	Macet	6.500.000.000
2022	7.500.000.000	1.000.000.000	6.500.000.000	100%	Macet	6.500.000.000
2023	7.500.000.000	1.000.000.000	6.500.000.000	10%	Kurang Lancar	650.000.000
2024	7.500.000.000		7.500.000.000			-
Jumlah Piutang			**33.500.000.000**	**Jumlah Penyisihan**		**20.150.000.000**

D.2.1.1.17.2. Penyisihan Piutang Pemberian Pinjaman (BA 999.04)

Penyisihan Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.914.325.478.458 dan Rp13.005.909.661.729. Penyisihan Piutang Tak Tertagih berupa Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak, terdiri dari:

a. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman, dan
b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman.

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih, sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	7.519.181.669.315	7.400.532.661.740
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman	5.395.143.809.143	5.605.376.999.989
Jumlah	**12.914.325.478.458**	**13.005.909.661.729**

D.2.1.1.17.3. Penyisihan Piutang Subsidi (BA 999.07)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp12.350.000.000 dan Rp6.175.000.000. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.350.000.000 terdapat pada Kementerian Pertanian yang terdiri dari:

Uraian	Ditjen TP	Total
Piutang Bukan Pajak	12.350.000.000	**12.350.000.000**
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	12.350.000.000	**12.350.000.000**
Piutang Bukan Pajak (Netto)	0	**0**

Berdasarkan tabel diatas, penyisihan piutang tak tertagih-jangka pendek dirubah tingkat kolektibilitas Piutang PNBP pada PT Sang Hyang Seri dari kategori diragukan menjadi menjadi macet, sehingga nilai akumulasi penyisihan dan beban penyisihan atas piutang PNBP pada PT Sang Hyang Seri dengan persentase penyisihan 100%. Hal ini, Ditjen Tanaman Pangan sudah bersurat dengan Nomor B-1907/PW.220/C-1/06/2023 tanggal 5 Juni 2023 perihal penyelesaian kewajiban tahun 2023 agar dapat dilakukan sebagian penyelesaian sampai dengan tahun 2023.

D.2.1.1.17.4. Penyisihan Piutang Belanja Lain-Lain (BA 999.08)

Saldo penyisihan piutang tak tertagih-piutang bukan pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp289.642.082.960 dan Rp1.737.684.276. Penyisihan piutang tak tertagih – piutang bukan pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Perbandingan penyisihan piutang tak tertagih – piutang bukan pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2023	31 Desember 2022
059	Kementerian Kominfo	45.489.439	61.314.529
015	Kementerian Keuangan	31.993.583	-
018	Kementerian Pertanian	288.901.122.353	1.444.505.613
999	MPP Kartu Prakerja	553.313.000	4.107.723
999	Otoritas Jasa Keuangan	-	119.223.400
999	SKK Migas	110.164.585	108.533.011
Total		**289.642.082.960**	**1.737.684.276**

D.2.1.1.17.5. Penyisihan Piutang Transaksi Khusus (BA 999.99)

Nilai penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp207.845.755.519.971 dan Rp196.722.184.871.140 merupakan penyisihan Piutang DJPB, Pemanfaatan Aset Eks Pertamina, Aset Kredit Eks BPPN, Aset KKKS, Piutang kepada Yayasan Supersemar dan Piutang Migas. Rincian perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Penyisihan Piutang DJPB	667.995.691	658.311.314
Penyisihan Piutang Aset Kredit eks BPPN	199.878.507.984.609	201.684.874.676.673
Penyisihan Piutang Pemanfaatan Aset Eks Pertamina	-	-
Penyisihan Piutang Pemanfaatan Aset KKKS	23.888.526.730	23.248.858.829
Penyisihan Piutang Pemanfaatan Piutang kepada Yayasan Supersemar	4.604.483.426.257	4.645.258.459.848
Penyisihan Piutang Pemanfaatan Aset BPLS	2.689.299.354.924	2.837.814.206.409
Penyisihan Piutang Sumber Daya Alam	648.908.231.760	408.082.761.393
Total	**207.845.755.519.971**	**209.599.937.274.466**

1. Penyisihan piutang tak tertagih piutang DJPB per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp667.995.691 dan Rp658.311.314.

2. Penyisihan piutang tak tertagih piutang atas Aset Kredit Eks BPPN berasal dari penyisihan piutang lain-lain.

   Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berasal dari penyisihan piutang lain-lain. Metode penyisihan piutang tidak tertagih atas aset kredit eks BPPN, aset kredit eks Kelolaan PT PPA (Persero), dan Aset Kredit yang diserahkelolakan kepada PT PPA (Persero) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak tertagih Eks BPPN, dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero). Sedangkan metode penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang eks BDL diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 207/PMK.09/2019.

   Nilai penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp199.878.507.984.609 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp201.684.874.676.673, terdapat penurunan penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp1.806.366.692.066.

   Rincian Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan di Lampiran LD12.

3. Penyisihan piutang tak tertagih piutang atas pemanfaatan aset eks Pertamina
   Mengacu ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, atas Piutang PNBP berupa piutang sewa BMN sebesar Rp1.176.715.352.919 dilakukan penyisihan sebesar 100%. Dengan pertimbangan bahwa masih dilakukan proses pembahasan bersama antara DJKN dengan PT Pertamina EP untuk menentukan besarnya nilai piutang sewa.

   Piutang sewa sebesar Rp1.176.715.352.919 telah timbul sejak tahun 2017 karena terdapat perbedaan pengakuan nilai perolehan BMN Eks Pertamina yang disewa oleh Pertamina EP

antara DJKN dengan Pertamina EP. DJKN mengakui nilai perolehan BMN yang disewa Pertamina EP didasarkan pada surat Menteri Keuangan Nomor S-23/MK.6/2009 tanggal 23 Januari 2009 yang menjelaskan nilai objek sewa selama 32 Tahun sebesar Rp9.472.807.941.523, sedangkan Pertamina EP mengakui BMN Eks Pertamina yang disewa sebesar Rp6.630.929.353.338 berdasarkan surat SKK Migas Nomor SRT-1294/SKKO0000/2014/S4 tanggal 30 Desember 2014 sebagaimana tertuang dalam perjanjian sewa antara Kementerian Keuangan dengan PT Pertamina EP Nomor PRJ-3/MK.6/2016 tanggal 20 September 2016 yang menyatakan objek sewa menyewa adalah BMN yang berasal dari kelompok aset eks KKKS Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina EP berupa fasilitas produksi, bangunan, HBM bergerak, dan aset lain-lain senilai Rp6.630.929.353.338.

Mengingat telah dilakukan penandatanganan perjanjian sewa antara Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Direktur Utama PT Pertamina EP Nomor PRJ-1/MK.6/2022 Nomor 001/PEP00000/2022-S0 tanggal 27 Desember 2022. Dengan adanya kesepakatan perjanjian sewa tersebut dimana menggunakan angka dasar sewa sebesar Rp6.630.929.353.338 dengan jangka waktu perjanjian sewa selama 32 (tiga puluh dua) tahun terhitung sejak tanggal 17 September 2003 dan berakhir tanggal 16 September 2035, maka penyisihan piutang yang timbul karena adanya selisih pengenaan angka dasar sewa dilakukan koreksi dari semula Rp1.176.715.352.919 menjadi Rp0.

Kemudian terhadap Piutang Sewa oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP selama Januari s.d. Juni 2023 dilakukan penyisihan sebesar 0,5% yaitu Rp518.041.356. Mengingat PT Pertamina EP telah melakukan pembayaran atas sewa penggunaan aset Eks Pertamina sebesar Rp207.216.542.292, maka atas penyisihan piutang disesuaikan menjadi Rp0.

4. Penyisihan piutang tak tertagih Aset KKKS
   Penyisihan piutang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp23.888.526.730 dan Rp23.248.858.829. Hasil perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2023 berdasarkan PMK 69/PMK.06/2014 adalah sebesar 100% dari nilai Piutang per 31 Desember 2023 karena umur piutang tersebut telah melebihi 5 tahun setelah tanggal jatuh tempo.

5. Penyisihan piutang tak tertagih kepada Yayasan Supersemar
   Penyisihan Piutang Tak Tertagih kepada Yayasan Supersemar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp4.604.483.426.257 dan Rp4.645.258.459.848, atau mengalami penurunan sebesar Rp40.775.033.591 (0,88%). Penurunan tersebut disebabkan adanya Koreksi Penyajian Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp40.775.033.591. Koreksi tersebut antara lain disebabkan adanya penilaian ulang barang sitaan Yayasan Supersemar oleh KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan pada tanggal 30 November 2023. Nilai agunan atau nilai barang sitaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp144.515.999.998 turun Rp6.287.400.000 dari periode sebelumnya sebesar Rp150.803.399.998. Nilai tersebut merupakan nilai barang sitaan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (ditetapkan sebesar 60%).

6. Penyisihan Piutang Pemanfaatan Aset BPLS

   Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Bukan Pajak Aset BPLS per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.689.299.354.924 sedang nilai penyisihan per 31 Desember 2022 adalah Rp2.837.814.206.409, artinya Penyisihan atas Piutang Tidak Tertagih telah dikenakan tarif 100% atau kategori dengan kualitas piutang macet karena piutang tidak dilunasi lebih dari 3 (tiga) tahun sejak jatuh tempo.

   Perubahan saldo penyisihan ini berdasarkan hasil kesepakatan tripartit antara BUN, DJKN dan PPLS. Adapun nilai Penyisihan Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Jangka Pendek Lainnya Penanganan Lumpur Sidoarjo ini diperoleh dari jurnal koreksi BPK.

   Hasil penilaian kembali jaminan adalah sebagai berikut :

   a. Tanah seluas 622,34 Ha sesuai Laporan Penilaian nomor: 00347/2.00113-00/PI/0561/1/IXI/2021 tanggal 4 Desember 2021 mempunyai nilai wajar sebesar minus 137.276.401.432 rupiah yang kemudian dianggap nol karena nilainya negatif.

   b. Tanah seluas 22,85 Ha sesuai Laporan Penilaian nomor: 00348/2.013-00/PI/0561/1/IXI/2021 tanggal 4 Desember 2021 mempunyai nilai wajar 58.234.000.000 rupiah dan nilai ini yang kemudian digunakan untuk menghitung nilai penyisihan piutang yang dalam pertemuan tripartit antara BUN, DJKN dan PPLS disepakati sudah mencapai kualitas piutang macet.

7. Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang PNBP Sumber Daya Alam per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp648.908.231.760 dan Rp408.082.761.393 merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek migas dari piutang minyak bumi, gas bumi dan migas lainnya yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Rincian penyisihan piutang berdasarkan kualitas terdiri dari:

Kualitas Piutang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kualitas Lancar	77.938.376.804	94.128.915.143
Kualitas Kurang Lancar	21.772.128.774	90.363.155.605
Kualitas Diragukan	536.954.604.137	223.463.400.372
Kualitas Macet	12.243.122.045	127.290.274
Jumlah	**648.908.231.760**	**408.082.761.393**

D.2.1.1.18. PIUTANG PFK

Piutang PFK per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp109.652.841 dan Rp22.005.766 mengalami kenaikan sebesar Rp87.647.075 (398,29%). Piutang tersebut berasal dari Piutang Pengembalian Kelebihan Penyaluran PFK Tahun Anggaran Yang Lalu, dengan rincian sebagai berikut :

No	Piutang Dari	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Piutang Pengembalian Kelebihan Penyaluran PFK Tahun Anggaran Yang Lalu (118122)	109.652.841	22.005.766
	Jumlah	**109.652.841**	**22.005.766**

Piutang PFK Pegawai yaitu akun 118111, 118113, 118114 dan 118124 berasal dari SPM atas Gaji Induk/Susulan/Kekurangan/Terusan satuan kerja di seluruh Indonesia yang diterima KPPN mitra kerja satker yang bersangkutan pada tanggal pelaporan namun belum diproses menjadi SP2D pada tanggal yang sama; dan/atau SPM Gaji Induk/Susulan/Kekurangan/Terusan satuan kerja di seluruh Indonesia telah diunggah dalam SPAN, namun tidak disetujui oleh Kepala Seksi Pencairan Dana dan belum dibatalkan invoice-nya oleh Petugas FO Validator.

Piutang PFK Pegawai tersebut dapat bersaldo negatif. Hal ini disebabkan oleh adanya SP2D yang diterbitkan (tanggal GL SP2D) pada periode berkenaan, namun SPM diterbitkan dan diunggah ke SPAN (tanggal GL invoice) diluar periode berkenaan (periode berikutnya).

Piutang Pengembalian Kelebihan Penyaluran PFK Tahun Anggaran Yang Lalu (Akun 118122) adalah akun yang digunakan untuk menampung kelebihan penyaluran Dana PFK Pegawai selama satu tahun kepada Badan Penyelenggara. Kelebihan penyaluran Dana PFK Pegawai menunjukkan bahwa penerimaan Dana PFK Pegawai kurang dari penyaluran (pembayaran) Dana PFK Pegawai kepada Badan Penyelenggara. Penerimaan PFK Pegawai yang berkurang umumnya disebabkan oleh 2 (dua) hal, yakni di tahun berjalan terdapat:

1. koreksi transaksi penerimaan Dana PFK Pegawai berdasarkan permintaan dari pemotong dan penyetor gaji/penghasilan tetap bulanan untuk dana PFK, dan
2. permintaan pengembalian kelebihan setoran/potongan penerimaan PFK Pegawai, yang terjadi setelah Dana PFK Pegawai disalurkan ke Badan Penyelenggara.

Badan Penyelenggara memiliki kewajiban untuk mengembalikan kelebihan penyaluran tersebut ke Kas Negara. Karakteristik akun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Saldo Akun 118122 bertambah hanya dari jurnal manual (koreksi manual) dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai Tahunan. Jurnal manual dilakukan setelah pembayaran atas permintaan pengembalian kelebihan setoran/potongan penerimaan PFK Pegawai dan koreksi transaksi penerimaan Dana PFK Pegawai berdasarkan permintaan dari pemotong dan penyetor gaji/penghasilan tetap bulanan untuk dana PFK di tahun berjalan telah selesai. Jurnal manual dilakukan untuk mereklasifikasi saldo negatif (debit) akun utang PFK di akhir tahun ke Akun 118122. Saldo utang PFK yang bernilai negatif (debit) menunjukkan bahwa terdapat kelebihan penyaluran Dana PFK Pegawai kepada Badan Penyelenggara.
2. Saldo Akun 118122 berkurang ketika Badan Penyelenggara mengembalikan kelebihan penyaluran tersebut ke Kas Negara dengan menggunakan Akun PFK 811921 (Penerimaan Pengembalian Kelebihan Penyaluran PFK Tahun Anggaran Yang Lalu).

D.2.1.1.19. PERSEDIAAN

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.216.445.390 dan Rp1.080.515.563 mengalami kenaikan sebesar Rp135.929.827 (12,58%). Persediaan yang terdapat pada SKK Migas dan BP Batam tersebut merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Perbandingan persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Barang Konsumsi	1.202.342.988	1.065.199.951
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	8.720.208	6.739.520
3	Bahan Baku	-	-
4	Persediaan dalam Rangka Bantuan	-	-
5	Persediaan Lainnya	5.382.194	8.576.092
	Jumlah	**1.216.445.390**	**1.080.515.563**

D.2.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

D.2.1.2.1. DANA BERGULIR

Nilai Dana Bergulir per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp19.553.196.920.303 dan Rp18.311.462.826.420 mengalami kenaikan sebesar Rp1.241.734.093.883 (6,78%). Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Dana bergulir yang dilaporkan merupakan dana bergulir yang bersumber dari Bagian Anggaran 999.03 atau dana bergulir yang bersumber dari Bagian Anggaran Lainnya, dan sedang dalam proses perguliran atau *outstanding* di masyarakat atau pihak ketiga lainnya.

Nilai dana bergulir yang disajikan sesuai dengan rincian:

No	UNIT PENGELOLA	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM	5.468.632.719.703	5.451.564.836.079
2	BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol	3.890.340.379.540	4.249.993.794.927
3	BLU Pusat Investasi Pemerintah	8.019.775.521.545	6.640.289.050.977
4	BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	874.548.562.835	637.009.941.741
5	BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (Dit. SMI)	1.283.355.073.501	1.314.717.940.318
6	BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	16.544.663.179	17.887.262.378
	JUMLAH	19.553.196.920.303	18.311.462.826.420

D.2.1.2.1.1. Dana Bergulir LPDB KUMKM

Dana bergulir pada BLU LPDB KUKM per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp5.468.632.719.703 dan Rp5.451.564.836.079.

Adapun rincian detail dana bergulir pada BLU LPDB KUMKM per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH
Piutang Dana Bergulir	5.121.364.329.200
NRB Dana Bergulir BA 044 sd 31 Desember 2023	347.268.390.503
Jumlah	**5.468.632.719.703**

Nilai Piutang Dana Bergulir 31 Desember 2023 sebesar Rp5.468.632.719.703 merupakan nilai piutang pokok mitra yang didalamnya tidak termasuk pembayaran piutang oleh Lembaga Penjamin Kredit (Jamkrida Jawa Tengah) atas klaim subrogasi mitra. Nilai Realisasi Bersih Dana Bergulir merupakan potensi pengembalian atas dana bergulir yang telah dicairkan dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada mitra Koperasi dan UKM, dimana pengembalian dana tersebut dikembalikan kepada LPDB-KUMKM sebagai Pengalihan Dana Bergulir. Besarnya Nilai Realisasi Bersih dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, tertagihnya dana bergulir dari mitra Koperasi dan UKM (sebagai pengalihan) serta piutang lancar dan piutang tidak lancar. LPDB-KUMKM mendapatkan Nilai Realisasi Bersih Dana Bergulir dari Biro Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM yang merupakan hasil dari laporan masing-masing Deputi Pelaksana Program, LPDB-KUMKM melaksanakan rekonsiliasi kas terkait dana pengalihan yang telah masuk ke rekening LPDB-KUMKM.

Adapun dalam laporan keuangan BA 999.03 klaim yang dicairkan oleh LPK dicatat sebagai penambah Dana Kelolaan BLU sehingga menambah juga nilai di kewajiban jangka panjang/kewajiban subrogasi. Klaim subrogasi sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut:

	Dokumen PKS		Total
	Nomor	Tanggal	
Koperasi Kampus Unsoed (klaim tahun 2022)	025/SP3-JJT/III/2020	18 Maret 2020	860.633.286
KSU Monjari 45 (klaim tahun 2023)	064/SP3-JJt-XII/2020	8 Desember 2020	348.412.800
KJKS BMT Bina Umat Mulia	2731/C.19/VIII/2017	21 Agustus 2017	140.961.811
Koperasi Produsen Cahaya Multi Indonesia	1700/DR-DP/JR/XII/2021	27 Desember 2023	400.000.000
Jumlah			**1.750.007.897**

Berdasarkan tabel di atas, klaim subrogasi atas Koperasi Kampus Unsoed sebesar Rp860.633.286 telah dicatat pada tahun 2022 dan terdapat klaim subrogasi atas KSU Monjari 45 sebesar Rp348.412.800, KJKS BMT Bina Umat Mulia sebesar Rp140.961.811, dan Koperasi Produsen Cahaya Multi Indonusa sebesar Rp400.000.000 telah dicatat pada tahun 2023.

Mutasi dana bergulir per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

MUTASI DANA BERGULIR 2023	
Piutang Dana Bergulir Per 1 Januari 2023	5.451.564.836.079
Mutasi Tambah:	
- Penyaluran Tahun 2023	1.816.279.666.901
- Koreksi dana bergulir tahun lalu	27.482.603
Mutasi Kurang:	
- Mutasi NRB	(9.975.380.910)
- Pengembalian Pokok Tahun 2023	(1.778.644.694.433)
- Crash Program 2023	(5.225.276.173)
- PSBDT 2022	(2.239.769.027)
- Penyetoran ke kas negara oleh kejaksaan atas mitra KUD Sulahan	(3.154.145.337)
Piutang Dana Bergulir Per 31 Desember 2023	**5.468.632.719.703**

Adapun penjelasan dari mutasi-mutasi yang disajikan pada tabel di atas sebagai berikut:

1. Mutasi tambah

   a. Nilai sebesar Rp1.816.279.666.901 merupakan dana bergulir yang telah tersalurkan ke koperasi periode januari sampai dengan 31 Desember 2023; dan
   b. Nilai sebesar Rp27.482.603 merupakan nilai koreksi atas pencatatan dana bergulir di periode tahun yang lalu.

2. Mutasi kurang

   a. Nilai sebesar Rp9.975.380.910 merupakan nilai mutasi NRB periode januari sampai dengan 31 Desember 2023. NRB berasal dari Kementerian Koperasi dan UKM dan telah dicatat LPDB-KUMKM pada akun dana bergulir sesuai dengan Surat Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM No. B-55/SM/KU.02.00/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 hal Nilai Realisasi Bersih (NRB) Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan UKM Periode 31 Desember 2023 dan telah dicatat LPDB-KUMKM pada akun dana bergulir sesuai dengan hasil rekonsiliasi antara LPDB-KUMKM dengan Kementerian Koperasi dan UKM pada rapat tanggal 9-12 Januari 2024.
   b. Nilai sebesar Rp1.778.644.694.433 merupakan pengembalian dana bergulir dari koperasi ke LPDB-KUMKM dari periode januari sampai dengan 31 Desember 2023.
   c. Mitra yang mengikuti Crash Program Tahun 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp5.225.276.173.
   d. Mitra Piutang Sementara Belum dapat Ditagih (PSBDT) senilai Rp2.239.769.027. Piutang tersebut telah dilakukan penghapusan bersyarat yaitu hapus catat namun tidak hapus tagih sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
   e. Nilai sebesar Rp3.154.145.337 merupakan nilai penyetoran ke kas negara oleh kejaksanaan atas mitra KUD Sulahan yang merupakan uang pengganti tindak pidana korupsi oleh pengurus KUD Sulahan sesuai Surat Pengantar Kejaksaan Negeri Bangli Nomor: TAR

1346/N.1.13/Ft.1/07/2022 tanggal 12 Juli 2022.

D.2.1.2.1.2. Dana Bergulir Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT

Dana Bergulir per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp3.890.340.379.540 dan Rp4.249.993.794.927 yang merupakan semua hak atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran.

Rincian Dana Bergulir Kementerian Pekerjaan Umum berupa piutang kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang timbul dari penggunaan dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol yang Perjanjian Pengadaan Jalan Tol nya telah ditandatangani antara BPJT dan BUJT. Piutang pada BUJT akan jatuh tempo dan dibayar kembali oleh BUJT kepada BLU BP Set BPJT setelah pengadaan tanah selesai dan/atau jalan tol telah dioperasikan, mana yang lebih dahulu tercapai.

Rincian Dana Bergulir BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol yang digulirkan dan menjadi piutang pada BUJT adalah sebagai berikut.

BUJT/Ruas Jalan Tol	31 Desember 2023	31 Desember 2022
PT. Jasa Marga Surabaya-Mojokerto/ Surabaya –Mojokerto	142.058.292.184	177.572.865.231
PT. Pemalang Batang Toll Road / Pemalang – Batang	173.730.172.460	177.730.172.460
PT. Trans Marga Jateng / Semarang – Solo (Bawen – Kartasura)	96.465.054.626	113.488.299.560
PT. Marga Setiapuritama / Semarang – Batang	17.380.830.821	17.380.830.821
PT. Pejagan Pemalang Tol Road / Pejagan – Pemalang	176.007.138.972	216.007.138.972
PT. Translingkar Kita Jaya / Cinere – Jagorawi	313.993.673.322	399.993.673.322
PT. Transjabar Tol / Ciawi – Sukabumi	691.921.936.197	694.700.739.153
PT. Marga Kunciran Cengkareng/ Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran	750.225.629.202	765.536.356.328
PT. Marga Trans Nusantara / Kunciran – Serpong	548.617.667.026	645.432.549.442
PT. Citra Waspphutowa / Depok – Antasari	525.448.216.382	580.448.216.382
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways / Cibitung-Cilincing	285.996.789.617	287.996.789.617
PT Cimanggis Cibitung Tollway / Cimanggis-Cibitung	168.494.978.731	173.706.163.639
Jumlah	**3.890.340.379.540**	**4.249.993.794.927**

Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka sejak bulan Januari Tahun 2015 pembayaran UGR menggunakan dana APBN sehingga penggunaan dana bergulir BLU menjadi terhenti.

Perkembangan Penting Sehubungan dengan Penyaluran Dana Bergulir

a. Terdapat 12 BUJT yang telah menandatangani Perjanjian Penyelesaian Piutang Eks Satker BLU BP Set BPJT pada tahun 2022 dan 2023. Sisanya sebanyak satu BUJT, yakni PT Marga Setiapuritama belum menandatangani Perjanjian Penyelesaian Piutang Eks Satker BLU BP Set BPJT.

b. Berdasarkan Surat Kepala BPJT No. HK02.03-P/95 tanggal 7 Juli 2015 kepada PT Marga Setiapuritama dan Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor HK.02.03-Mn/539 tanggal 3 Juli 2015 dilakukan Pengakhiran Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) ruas Semarang-Batang dengan nama BUJT PT Marga Setiapuritama.

   Sebagai tindak lanjut pengakhiran PPJT, Kepala Satker BLU BP Set BPJT telah menyampaikan surat nomor KU.02.03.Pt5/Kasatker/2334 tanggal 9 Juli 2015 kepada PT Marga Setiapuritama untuk Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Layanan Dana Bergulir. Dan sebagai konsekwensinya adalah segala piutang BLU BP Set BPJT kepada PT Marga Setiapuritama menjadi jatuh tempo seketika dan perhitungan Nilai Tambah dan Denda Nilai Tambah dihentikan sejak tanggal 7 Juli 2015.

   Selanjutnya Kepala BLU BP Set BPJT mengirim Surat ke Kepala BPJT agar piutang tersebut diatas dijadikan kewajiban bagi BUJT baru yang mendapat hak pengusahaan untuk ruas tersebut.

   Ruas Semarang-Batang ditender ulang dan telah dibentuk BUJT baru untuk menyelesaikan ruas jalan tol tersebut yaitu PT Jasamarga Semarang Batang sebagai pemenang tender dengan PPJT Nomor 01/PPJT/BPJT/2016 tanggal 27 April 2016.

   BUJT lama yaitu PT Marga Setiapuritama mengajukan permohonan arbitrase kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diadakan dan diselenggarakan pemeriksaan arbitrase (permohonan arbitrase) atas perselisihan atau sengketa antara BPJT dan PT Marga Setiapuritama, dengan surat nomor 193/MSP-1601/AF/VIII/16 tanggal 18 Agustus 2016, dan telah didaftarkan di Sekretariat BANI dengan Register Nomor 881/VIII/ARB-BANI/2016 tanggal 18 Agustus 2016. BANI telah memberikan keputusan pada tanggal 13 September 2017 namun PT Marga Setiapuritama tidak puas dengan keputusan BANI dan kemudian menggugat keputusan BANI ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan BANI dengan Register Nomor 504/Pdt.G.Arb/2017/ PN.Jkt.Sel tanggal 9 Agustus 2017 dan PN Jakarta telah memberikan keputusan pada tanggal 28 September 2017.

   Kemudian PT Marga Setiapuritama mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Nomor 159/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Februari 2018. PN Jakarta Selatan menolak gugatan tersebut pada tanggal 30 Agustus 2018. PT Marga Setiapuritama kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Nomor Register 199/PDT/2019/PT.DKI dan PT DKI Jakarta telah memberikan keputusan pada tanggal 30 April 2019 yang pada intinya menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta.

D.2.1.2.1.3. Dana Bergulir Pusat Investasi pemerintah

Nilai Dana Bergulir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 pada BLU PIP sebesar Rp8.019.775.521.545 dan Rp6.640.289.050.977 terjadi kenaikan sebesar Rp1.379.486.470.568 atau 20,77%. Kenaikan tersebut karena Dana Bergulir telah disalurkan kepada penyalur/masyarakat. Realisasi tersebut berupa pemberian pinjaman kepada beberapa Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yaitu sebagai berikut:

No	LKBB/ *Linkage*	Jumlah Nilai Akad	Jumlah Penyaluran	Outstanding
				31 Desember 2023
1	PT. Pegadaian	1.790.000.000.000	1.486.999.400.000	25.592.859.683
2	PT. PNM	14.747.000.000.000	14.987.000.000.000	7.235.632.183.872
3	Koperasi Syariah Annisa	300.000.000	300.000.000	40.000.000
4	KSPPS Bhakti Huria Syariah	1.000.000.000	1.000.000.000	200.000.000
5	KSPPS Mandiri Sejahtera	2.000.000.000	2.000.000.000	466.666.666
6	KSP KARYA BAITUL MANDIRI	51.500.000.000	51.500.000.000	41.400.000.001
7	PT. Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia	30.000.000.000	32.000.000.000	12.898.210.561
8	LKMA Mojo Agung	475.000.000	475.000.000	405.000.000
9	LKMA Tani Makmur	375.000.000	375.000.000	225.000.000
10	PT LKMS Mahirah Muamalah (Syariah)	5.600.000.000	3.620.000.000	2.776.666.663
11	KSPPS BMT Al Amanah Sinjai (Syariah)	700.000.000	700.000.000	443.333.337
12	Kopdit Pelangi Kasih	7.500.000.000	5.180.000.000	4.986.666.667
13	Koperasi Al Manar	500.000.000	1.700.000.000	1.550.000.000
14	KSPPS Raya Banda Madani	37.500.000.000	33.500.000.000	27.850.000.003
15	KPPS Artha Bahana Syariah	5.000.000.000	5.000.000.000	8.027.586.209
16	KSP Jujur Utama Mandiri	1.000.000.000	1.000.000.000	857.142.857
17	KPS Sila Mukti	2.000.000.000	800.000.000	1.371.428.572
18	KSP Sari Sedana Bali	2.000.000.000	2.000.000.000	1.714.285.714
19	KSP KUD Muntorogo	20.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
20	KSPPS Abdi Kerta Raharja	10.000.000.000	4.000.000.000	3.733.333.334
21	KSP Guna Prima Dana	3.500.000.000	3.500.000.000	3.266.666.666
22	PT LKM Gentha Persada	300.000.000	120.000.000	232.000.000
23	KSPPS BMT Mitra Umat	6.200.000.000	2.400.000.000	2.320.000.000
24	KSU Gapoktan Al Basiko II	1.200.000.000	400.000.000	1.200.000.000
25	KSPPS BMT Jati	500.000.000	500.000.000	500.000.000
26	PT LKM Batang	10.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
27	KSPPS Benteng Mikro Indonesia	150.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000
28	KSPPS Mitra Dhuafa Syariah	40.000.000.000	16.000.000.000	32.000.000.000
29	Koperasi Jasa Karya Abadi	7.500.000.000	1.500.000.000	4.500.000.000
30	KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi	14.600.000.000	11.680.000.000	11.680.000.000
31	KSP Permata Siaga	1.000.000.000	400.000.000	800.000.000
32	KSPPS BMT Al Ishlah	300.000.000	150.000.000	150.000.000
33	KSPPS BMT Ibaadurrahman	4.400.000.000	1.540.000.000	3.080.000.000
34	Koperasi Konsumen Central Hutama Mandiri	1.000.000.000	400.000.000	400.000.000

No	LKBB/ *Linkage*	Jumlah Nilai Akad	Jumlah Penyaluran	Outstanding
				31 Desember 2023
35	KSPPS BMT Bina Auladi Mandiri	1.700.000.000	510.000.000	510.000.000
36	KSPPS BMT Ayyasi	950.000.000	380.000.000	380.000.000
37	BMT Niaga Utama	3.000.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
38	BMT Al Hidayah Ummat Sejahtera	1.500.000.000	600.000.000	600.000.000
39	KSP Karya Mandiri	2.500.000.000	625.000.000	625.000.000
40	Bahana Artha Ventura (BAV)	2.450.900.000.000	2.438.600.000.000	511.141.490.743
41	Direct Lending (2 penerima)	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	Jumlah	**19.415.520.000.000**	**19.174.674.400.000**	**8.019.775.521.548**

Selisih Rp3 karena akumulasi pembulatan

D.2.1.2.1.4. Dana Bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)

Pos Dana Bergulir berasal dari saldo akhir Dana Bergulir pada buku besar akrual yang merupakan transaksi penyaluran dana bergulir oleh BLU kepada masyarakat yang sumber dananya berasal dari APBN (BA BUN Investasi). Jumlah Investasi Jangka Panjang berupa Dana Bergulir per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp874.548.562.835 dan Rp637.009.941.741.

Saldo Dana Bergulir pada tahun 2023 sebesar Rp874.548.562.835 mengalami peningkatan Rp237.538.621.094 dari tahun 2022 sebesar Rp637.009.941.741. Jumlah Dana Bergulir tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2017 BLU LPMUKP telah menyetujui penyaluran dana bergulir kepada 18 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang mencakup LKM-KP, UMKM-KP dan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan. Total plafon yang disetujui oleh LPMUKP sebesar Rp32.880.000.000 dari total plafon pinjaman yang diajukan sebesar Rp60.330.000.000 yang diajukan oleh 18 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan antara lain di bidang perikanan tangkap, budidaya, usaha garam, pengolahan dan pemasaran, dan wisata bahari. Sampai dengan 31 Desember 2017 LPMUKP telah melakukan pencairan Dana Bergulir sebesar Rp11.125.000.000 kepada 7 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dari total dana kelolaan sebesar Rp500.000.000.000.
2. Pada tahun 2018 BLU LPMUKP telah menyetujui penyaluran dana bergulir kepada 587 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang mencakup LKM-KP, UMKM-KP dan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan. Total plafon yang disetujui oleh LPMUKP sebesar Rp333.416.340.000 yang diajukan oleh Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan antara lain di bidang perikanan tangkap, budidaya, usaha garam, pengolahan dan pemasaran, dan wisata bahari. Selama tahun 2018 per tanggal 1 Januari Sampai dengan 31 Desember 2018 LPMUKP telah melakukan pencairan Dana Bergulir sebesar Rp215.732.780.000 kepada 293 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Total pencairan Dana Bergulir sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp226.857.780.000 yang telah dicairkan kepada 300 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dari total dana kelolaan sebesar Rp1.350.000.000.000.
3. Pada tahun 2019 BLU LPMUKP telah menyetujui penyaluran dana bergulir kepada 333 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang mencakup LKM-KP, UMKM-KP dan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan. Total plafon yang disetujui oleh LPMUKP sebesar Rp129.500.260.000 yang diajukan oleh Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan antara lain di bidang perikanan

tangkap, budidaya, usaha garam, pengolahan dan pemasaran, dan wisata bahari. Selama tahun 2019 per tanggal 1 Januari Sampai dengan 31 Desember 2019 LPMUKP telah melakukan pencairan Dana Bergulir sebesar Rp182.530.860.000 kepada 394 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikananan. Total pencairan Dana Bergulir sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp409.388.640.000 yang telah dicairkan kepada 694 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.

4. Pada tahun 2020 BLU LPMUKP telah menyetujui penyaluran dana bergulir kepada 757 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang mencakup LKM-KP, UMKM-KP dan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan. Total plafon yang disetujui oleh LPMUKP sebesar Rp250.814.430.000 yang diajukan oleh Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan antara lain di bidang perikanan tangkap, budidaya, usaha garam, pengolahan dan pemasaran, dan wisata bahari. Selama tahun 2020 per tanggal 1 Januari Sampai dengan 31 Desember 2020 LPMUKP telah melakukanpencairan Dana Bergulir sebesar Rp192.674.433.490 kepada 389 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Total pencairan Dana Bergulir sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp602.063.073.490 yang telah dicairkan kepada 1.089 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.

5. Pada tahun 2021 BLU LPMUKP telah menyetujui penyaluran dana bergulir kepada 3426 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang mencakup LKM-KP, UMKM-KP dan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan. Total plafon yang disetujui oleh LPMUKP sebesar Rp1.038.141.265.000 yang diajukan oleh Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan antara lain di bidang perikanan tangkap, budidaya, usaha garam, pengolahan dan pemasaran, dan wisata bahari. Selama tahun 2021 per tanggal 1 Januari Sampai dengan 31 Desember 2021 LPMUKP telah melakukan pencairan Dana Bergulir sebesar Rp270.553.725.000 kepada 1.074 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Total pencairan Dana Bergulir sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp872.616.798.490 yang telah dicairkan kepada 2.162 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Realisasi pencairan pada tahun 2021 sebesar Rp270.553.725.000 mengalami peningkatan Rp77.879.291.510 dari tahun 2020 sebesar Rp192.674.433.490, peningkatan tersebut antara lain karena seiring bertambahnya jumlah pengajuan pinjaman dana bergulir dan bertambahnya jumlah pegawai BLU LPMUKP pada tahun 2021. Dari total pencairan tersebut, terdapat jaminan senilai Rp1.183.558.978.027 dengan pengikatan jaminan senilai Rp903.264.702.000

6. Pada tahun 2022 BLU LPMUKP telah merealisasikan pencairan dana bergulir kepada 2.788 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang mencakup LKM-KP, UMKM-KP dan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan. Selama tahun 2022 per tanggal 1 Januari Sampai dengan 31 Desember 2022 LPMUKP telah melakukan pencairan Dana Bergulir sebesar Rp133.229.750.000 kepada 626 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Total pencairan Dana Bergulir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.005.846.548.490. Dari total pencairan tersebut terdapat pengikatan jaminan senilai Rp1.046.364.512.000.

7. Sampai dengan 31 Desember 2023 BLU LPMUKP telah merealisasikan pencairan dana bergulir kepada 3.029 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang mencakup LKM-KP, UMKM-KP dan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan. Sampai dengan 31 Desember 2023 LPMUKP telah melakukan pencairan Dana Bergulir sebesar Rp328.512.512.900 kepada 241 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Total pencairan Dana Bergulir sampai dengan 31 Desember 2023

sebesar Rp1.334.359.061.390. Dari total pencairan tersebut terdapat pengikatan jaminan senilai Rp954.903.544.770.

8. Jumlah Investasi Jangka Panjang berupa Dana Bergulir per 31 Desember 2023 sebesar Rp874.548.562.835 adalah jumlah Dana Bergulir yang sudah termasuk Pengembalian Pokok dari Debitur (LKM-KP, UMKM-KP dan KUKP) sebesar Rp459.810.498.555.

D.2.1.2.1.5. Dana Bergulir Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup – Dit. SMI

Saldo dana bergulir pada BLU BPDLH (Dit. SMI) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.283.355.073.501 dan Rp1.314.717.940.318 mengalami penurunan sebesar Rp31.362.866.817 atau 2,39% dari saldo 31 Desember 2022. Penurunan tersebut terjadi dikarenakan Dana Bergulir untuk pembiayaan lingkungan belum disalurkan kepada penyalur/masyarakat dan masih dicatat sebagai dana kelolaan BLU oleh BPDLH.

D.2.1.2.1.6. Dana Bergulir Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

KPA BA 999.03 BLU BPDLH ditetapkan melalui KMK nomor 89/KMK.06/2022 tanggal 18 Maret 2022. Pada tanggal 2 November 2022 dilakukan pemindahbukuan dana DNS dari Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (UAIP) kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggran (UAKPA) Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sesuai dengan BAST Nomor BA-14/KN.3/2022 dan Nomor BAST-24/BPDLH.2/2022 tanggal 2 November 2022, sehingga pencatatan dana DNS dicatat oleh KPA BLU BPDLH.

Nilai dana bergulir pada KPA BLU BPDLH sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp16.544.663.179, terdapat penurunan sebesar Rp1.342.599.199 dari nilai per 31 Desember 2022. Adapun rincian dana DNS eks KLH dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Rp
Nilai Dana Bergulir 31 Desember 2022	Rp17.887.262.378
Pengembalian dari Debitur selama tahun 2023 yang diakui sebagai Pokok	(Rp1.342.599.199)
Nilai Dana Bergulir DNS akhir TA 2023	**Rp16.544.663.179**

D.2.1.2.2. DANA BERGULIR DIRAGUKAN TERTAGIH

Nilai dana bergulir diragukan tertagih per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.562.930.032.200 dan Rp4.813.478.526.898 mengalami penurunan sebesar Rp3.250.548.494.698 (67,53%). Akun dana bergulir diragukan tertagih merupakan penyisihan yang dibentuk untuk mendapatkan nilai realisasi bersih dana bergulir. Secara rinci, penyisihan dana bergulir yang diragukan tertagih dibentuk pada entitas sebagai berikut:

No	UNIT PENGELOLA	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM	788.878.222.350	665.876.447.866
2	Satker BUN Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol	404.676.785.693	3.895.630.214.638
3	BLU LPMUKP	67.200.566.340	51.622.093.842
4	BLU BPDLH (Dit. SMI)	245.257.000.363	149.261.062.919
5	BLU PIP	40.372.794.275	33.201.445.255
6	BLU BPDLH	16.544.663.179	17.887.262.378
	JUMLAH	**1.562.930.032.200**	**4.813.478.526.898**

Perhitungan penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertagih sesuai dengan metode yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 158/PMK.06/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 168/PMK.06/2018 Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Non permanen Dalam Bentuk Tagihan.

1. BLU LPDB KUMKM

Nilai Dana Bergulir yang Diragukan Tertagih per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp788.878.222.350 dan Rp665.876.447.866.
Dana bergulir yang diragukan tertagih termasuk di dalamnya dana bergulir yang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas dasar jumlah tunggakan pokok piutang.

Terjadi penurunan penyisihan piutang dana bergulir yang cukup signifikan dikarenakan jaminan pada mitra macet sebagai pengurang penghitungan nilai penyisihan sudah terorganisir dengan baik, selain itu pemberian pembiayaan/pinjaman ke mitra lainnya harus tercover oleh jaminan, baik itu jaminan dari mitra ataupun dari Lembaga Penjamin Kredit.

Rincian perhitungan penyisihan piutang diragukan tertagih sebagai berikut :

URAIAN	Nilai
Penyisihan Piutang Dana Bergulir Tahun 2022	665.876.447.866
Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir Tahun 2023	123.001.774.484
Jumlah Dana Bergulir per 31 Desember 2023	**788.878.222.350**

Dana bergulir yang diragukan realisasinya sebesar Rp788.878.222.350 disebabkan oleh beberapa permasalahan diantaranya adalah resiko bisnis (kegagalan bisnis), karakter pengurus dan/atau manager, dan fraud manajemen/pengurus. Atas penyebab tersebut, dalam rangka pembinaan terhadap mitra LPDB-KUMKM yang telah menerima dana bergulir dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet telah dilakukan upaya penanganan diantaranya monitoring pembayaran piutang mitra, monitoring komitmen pembayaran piutang mitra, rescheduling dan restructuring.

Klasifikasi	Dana Bergulir 31 Desember 2023	Tarif Penyisihan	Dana Bergulir 31 Desember 2023 yang dapat diperhitungkan	Nilai Jaminan	Dana Bergulir diragukan Tertagih per 31 Desember 2023
Lancar	3.958.738.626.290	0,5%	19.793.693.132	4.749.960.088.000	837.595.131
Kurang Lancar	29.115.074.060	10%	2.911.507.406	27.828.680.000	349.328.200
Diragukan	7.744.162.992	50%	3.872.081.496	2.801.120.000	2.626.387.996
Macet	1.125.766.465.858	100%	1.125.766.465.858	402.579.560.946	785.064.911.023
Jumlah	**5.121.364.329.200**		**1.152.343.747.892**	**5.183.169.448.946**	**788.878.222.350**

2. BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol

Saldo Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp404.676.785.693 dan Rp3.895.630.214.638. Terjadi penurunan yang sangat signifikan sebesar Rp3.490.953.428.945 atau 89,61% dari nilai penyisihan periode sebelumnya yang disebabkan oleh perubahan kualitas dana bergulir.

Rincian Saldo Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah sebagai berikut:

BUJT/Ruas Jalan Tol	31 Desember 2023	31 Desember 2022
PT. Jasa Marga Surabaya-Mojokerto/ Surabaya –Mojokerto	14.205.829.218	177.572.865.231
PT. Pemalang Batang Toll Road / Pemalang – Batang	17.373.017.246	17.773.017.246
PT. Trans Marga Jateng / Semarang – Solo (Bawen – Kartasura)	9.646.505.463	113.488.299.560
PT. Marga Setiapuritama / Semarang – Batang	17.380.830.821	17.380.830.821
PT. Pejagan Pemalang Tol Road / Pejagan – Pemalang	17.600.713.897	21.600.713.897
PT. Translingkar Kita Jaya / Cinere – Jagorawi	31.399.367.332	399.993.673.322
PT. Transjabar Tol / Ciawi – Sukabumi	69.192.193.620	694.700.739.153
PT. Marga Kunciran Cengkareng/ Cengkareng-Batu Ceper- Kunciran	75.022.562.920	765.536.356.328
PT. Marga Trans Nusantara / Kunciran – Serpong	54.861.766.703	645.432.549.442
PT. Citra Waspphutowa / Depok – Antasari	52.544.821.638	580.448.216.382
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways/Cibitung-Cilincing	28.599.678.962	287.996.789.617
PT Cimanggis Cibitung Toll Way / Cimanggis-Cibitung	16.849.497.873	173.706.163.639
Jumlah	**404.676.785.693**	**3.895.630.214.638**

Penyebab tidak tertagihnya dana bergulir disebabkan belum seluruh BUJT menandatangani adendum/perjanjian layanan dana bergulir baru antara BPJT dan BUJT pasca dicabutnya status BLU BP Set BPJT sebagai Satker BLU. Terdapat 12 (dua belas) BUJT yang telah menandatangani perjanjian penyelesaian piutang Ex BLU BP Set BPJT. Sedangkan satu BUJT, yakni PT Marga Setiapuritama belum menandatangani Perjanjian Penyelesaian Piutang Eks Satker BLU BP Set BPJT.

Kualitas dana bergulir BUJT PT Pemalang Batang Tol Road, PT Pejagan Pemalang Tol Road, PT. Jasamarga Surabaya-Mojokerto, PT. Trans Marga Jateng, PT. Translingkar Kita Jaya, PT. Transjabar Tol, PT. Jasamarga Kunciran Cengkareng, PT. Marga Trans Nusantara, PT. Citra Waspphutowa, PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways, PT Cimanggis Cibitung Tollways mengalami perubahan dari Macet menjadi Kurang Lancar, berdasarkan PMK 69 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK 207 Tahun 2019, pada Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi:

a. Paling tinggi kualitas kurang lancar untuk Piutang yang sebelum Restrukturisasi memiliki kualitas diragukan atau kualitas macet, atau
b. Tidak berubah, apabila Piutang yang sebelum Restrukturisasi memiliki kualitas kurang lancar.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka satker Sekretariat Pengatur Jalan mengubah kualitas dana bergulir dana BUJT tersebut dari kualitas macet menjadi kualitas kurang lancar sesuai dengan perjanjian atau restrukturisasi antara Dana Bergulir BUJT dan BPJT.

Di dalam perjanjian tersebut disebutkan diantaranya maksud dan tujuan perjanjian yaitu untuk penyelesaian Piutang BUJT kepada Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol dengan ketentuan penyelesaian pokok pinjaman, penyelesaian denda, dan penyelesaian nilai tambah (bunga). Selain itu di dalam perjanjian diatur mengenai jadwal pengembalian pokok pinjaman sampai dengan tahun 2024.

Upaya penagihan yang dilakukan dengan memberikan pemberitahuan kepada para BUJT sebelum tanggal jatuh tempo dari setiap angsuran agar para BUJT segera menyelesaikan angsurannya.

3. BLU LPMUKP

Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah estimasi Dana Bergulir yang realisasi pengembaliannya diragukan dapat tertagih sebagian atau seluruhnya. Nilai Investasi Jangka Panjang berupa Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp67.200.566.340 dan Rp51.622.093.842. Jumlah Dana Bergulir Diragukan Tertagih meningkat Rp15.578.472.498 dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2022.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada 31 Desember 2023 senilai Rp67.200.566.340 merupakan nilai penyisihan piutang pokok dari hasil akumulasi outstanding pokok senilai Rp874.548.562.835 dikurang dengan nilai penyisihan jaminan sesuai kualitas piutang setiap debitur.

Rincian berdasarkan kolektibilitas dijelaskan sebagai berikut:

Kolektibilitas	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Lancar	729.962.649	81.763.246
Kurang Lancar	1.575.948.245	1.960.292.360
Diragukan	429.521.167	3.502.921.533
Macet	64.465.134.280	46.077.116.703
Jumlah	**67.200.566.340**	**51.622.093.842**

4. BLU BPDLH (Dit. SMI)

Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp245.257.000.363 dan Rp149.261.062.919, mengalami kenaikan sebesar Rp95.995.937.444 atau 64,31% dari tahun sebelumnya. Pada BLU BPDLH mulai tahun 2021, sesuai dengan rekomendasi BPK, dilakukan perhitungan jaminan sebagai pengurang penyisihan piutang.

Perhitungan nilai dana bergulir diragukan tertagih pada BLU BPDLH disajikan pada tabel berikut:

Kualitas	Per 31 Desember 2023				
1	*2*	*3*	*4=(2-3)*	*5*	*6=(4*5)*
	SALDO POKOK	NILAI JAMINAN	SALDO SETELAH JAMINAN	TARIF PENYISIHAN	AKM PENYISIHAN TAHUNAN
LANCAR	806.120.650.501	93.565.658.635	712.554.991.866	0,50%	3.562.774.959
KURANG LANCAR	23.597.634.008	456.000.000	23.141.634.008	10%	2.314.163.401
DIRAGUKAN	107.860.769.256	116.872.403.670	- 9.011.634.414	50%	- 4.505.817.207
MACET	345.798.813.323	101.912.934.113	243.885.879.210	100%	243.885.879.210
LUNAS POKOK	- 31.295.137	-	- 31.295.137		-
JUMLAH	**1.283.346.571.951**	**312.806.996.418**	**970.539.575.533**		**245.257.000.363**

Berdasarkan pendataan yang dilakukan, nilai perhitungan jaminan ini akan terus bertambah seiring dengan proses pendataan yang saat ini tengah dilakukan.

5. BLU PIP

Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU PIP per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp40.372.794.275 dan Rp33.201.445.255, mengalami kenaikan sebesar Rp7.171.349.020 atau 21,60% dari nilai penyisihan per 31 Desember 2022. Penurunan nilai penyisihan merupakan dampak dari adanya optimalisasi piutang.

BLU PIP baru melaksanakan penyisihan dana bergulir diragukan tertagis pada tahun 2021 sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 158/PMK.06/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 168/PMK.06/2018 Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Non permanen Dalam Bentuk Tagihan.

Rincian Perhitungan dana bergulir diragukan tertagih sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Nilai Outstanding	Tarif Penyisihan	Dana Bergulir diragukan tertagih
Lancar	8.016.892.188.211	0,50%	40.084.460.941
Kurang Lancar	2.883.333.334	10%	288.333.333
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	**8.019.775.521.545**		**40.372.794.274**

6. BLU BPDLH

Nilai dana bergulir diragukan tertagih pada KPA BLU BPDLH per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp16.544.663.179 dan Rp17.887.262.378, nilai tersebut berasal dari pengalihan dana DNS eks KLH yang disisihkan seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Rp
Nilai Dana Bergulir 31 Desember 2022	Rp17.887.262.378
Pengembalian dari Debitur selama tahun 2023 yang diakui sebagai Pokok	Rp 1.342.599.199
Nilai Dana Bergulir DNS akhir TA 2023	**Rp16.544.663.179**
Dana Bergulir diragukan tertagih akhir TA 2023	**(Rp16.544.663.179)**

D.2.1.2.3. INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN LAINNYA

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp280.412.334.935.034 dan Rp239.872.791.752.439 mengalami kenaikan sebesar Rp40.539.543.182.595 (16,90%).

Investasi nonpermanen Lainnya merupakan investasi nonpermanen yang dimiliki oleh Pemerintah selain Dana Bergulir. Rincian Investasi Nonpermanen Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Investasi Jangka Panjang Non Permanen	31 Desember 2023	31 Desember 2022
IP PEN Kementerian BUMN	9.912.499.999.411	9.302.480.860.411
UAIP	278.424.972.731	278.424.972.767
UAKPA Dit SMI (BLU LPDP, BP Tapera, BPDPKS)	240.529.752.919.543	199.619.616.324.242
UAKPA BLU LDKPI	8.000.000.000.000	6.000.000.000.000
PPA DJPK Pinjaman PEN Daerah	21.691.657.043.349	24.672.269.595.019
Jumlah	**280.412.334.935.034**	**239.872.791.752.439**

1. Investasi Pemerintah Pemulihan Ekonomi Nasional

Investasi Pemerintah Non Permanen lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional adalah masing-masing sebesar Rp9.912.499.999.411 dan Rp9.302.480.860.411. Terdapat kenaikan investasi sebesar Rp610.019.139.000 atau 6,56% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 karena adanya pencairan dari RIPPEN kepada PTPN III sebesar Rp1.047.519.139.000 dan pembayaran cicilan pokok oleh PT KAI Persero sebesar Rp437.500.000.000.

Program pemulihan ekonomi nasional baru dijalankan pada tahun 2020 sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang telah menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Non Alam tingkat nasional, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020. Adapun investasi pemerintah non permanen yang telah tersalurkan kepada BUMN penerima adalah sebagai berikut:

Penerima Investasi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	3.062.500.000.000	3.500.000.000.000
Perum Perumnas	650.000.000.000	650.000.000.000
PT Krakatau Steel	2.200.000.000.000	2.200.000.000.000
PT Perkebunan Nusantara III	3.999.999.999.411	2.952.480.860.411
Jumlah	**9.912.499.999.411**	**9.302.480.860.411**

a. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp3.500.000.000.000 untuk mendanai biaya operasional dan mendukung kinerja perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19. Pembiayaan Investasi Pemerintah PEN atas Perjanjian Nomor PRJ-13/KN/2020 sesuai Surat Ketetapan Pencairan (SKP) Nomor SK-4/KPA999.03.MBU/12/2020 dan Pengesahan SKP Nomor S-77/PB/PB.3/2020. Saat ini sudah dilakukan pembayaran cicilan pokok sebesar Rp437.500.000.000 sehingga nilai pokoknya menjadi sebesar Rp3.062.500.000.000.

b. Perum Perumnas sebesar Rp650.000.000.000 untuk membantu likuiditas perusahaan dan dalam rangka melaksanakan program pembangunan kawasan rumah tapak yang tersebar di seluruh Indonesia. Pembiayaan Investasi Pemerintah PEN atas Perjanjian Nomor PRJ-12/KN/2020 dan Nomor 179/PPI/SMF -KKRI/XI/2020 sesuai SKP Nomor SK-3/KPA999.03.MBU/11/2020 dan Pengesahan SKP Nomor S-68/PB/PB.3/2020, dan SKP Nomor SK-3/KPA999.03.MBU/11/2021 dan Pengesahan SKP Nomor S-173/PB/PB.3/2021.

c. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Sebesar Rp2.200.000.000.000 untuk memberikan relaksasi di industri hilir dan industri pengguna. Pembiayaan Investasi Pemerintah PEN atas Perjanjian Nomor PRJ-14/KN/2020 dan PERJ-187/SMI/1220 sesuai SKP Nomor SK-5/KPA999.03.MBU/12/2020 dan Pengesahan SKP Nomor S-89/PB/PB.3/2020.

d. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar Rp2.952.480.860.411 sesuai Perjanjian Nomor PRJ-16/KN/2020 dan 595/PKS/12/2020 sesuai SKP Nomor SK-2/KPA999.03.MBU/04/2021 dan Pengesahan SKP Nomor S-103/PB/PB.3/2021, SKP Nomor SK-4/KPA999.03.MBU/06/2021 dan Pengesahan SKP Nomor S-1 85/PB/PB.3/2021, dan SKP Nomor SK-7/KPA999.03.MBU/12/2021 dan Pengesahan SKP Nomor S-309/PB/PB.3/2021 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.02/2022 Tanggal 27 Juli 2022. Saat ini sudah dilakukan pencairan tahap akhir sebesar Rp1.047.519.139.000, sehingga total Investasi Non Permanen pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar Rp3.999.999.999.411.

2. Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada UAIP

Investasi nonpermanen pada UAIP per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp278.424.972.731 dan Rp278.424.972.767. Pada tahun 2023 investasi jangka panjang non permanen terdiri dari :

a. Investasi jangka panjang non permanen pada Kementerian Perindustrian sebesar Rp4.089.232.145.

b. Investasi jangka panjang non permanen pada tiga entitas yaitu PT Karabha Digdaya PT SEG dan PT Aldevco sebesar Rp274.335.740.586.

Investasi Non Permanen lainnya pada Kementerian Perindustrian merupakan investasi yang terbentuk dari pinjaman kepada perusahaan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) melalui Skim 2 dan diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil.

Skim 2 adalah pinjaman pembelian mesin dengan suku bunga rendah melalui sistem modal padanan. Pengelolaan pinjaman dengan suku bunga rendah untuk pembiayaan pembelian mesin/peralatan tersebut dilakukan melalui kerja sama antara Ditjen BIM dengan Lembaga

Pengelola Program (LPP). Proporsi modal padanan untuk pembelian mesin tersebut adalah: perusahan ITPT sebesar 20%, LPP sebesar 10% dan Kemenperin sebesar 70%.

Pihak yang bertindak sebagai LPP untuk penyaluran pinjaman pada tahun 2007 dan 2008 adalah PT PNM, sedangkan untuk pinjaman TA 2009 adalah BSM.

Nilai realisasi bersih investasi jangka panjang yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian adalah sebesar Rp0 yang merupakan nilai hasil pengurangan investasi pokok dengan nilai investasi jangka panjang non permanen lainnya diragukan realisasinya sebesar Rp4.089.232.145. Terdapat penurunan nilai Investasi Nonpermanen pada Kemenperin dikarenakan adanya koreksi atas kelebihan pengakuan sebesar Rp36. Nilai tersebut merupakan akumulasi sisa saldo pinjaman di bawah Rp50 dan saldo pinjaman bernilai negatif yang sudah tidak tercatat oleh Lembaga Pengelola Program (PT PNM dan BSM).

Investasi Non Permanen pada PT Karabha Digdaya, PT SEG dan PT Aldevco tahun 2021 senilai Rp274.335.740.586 merupakan pengalihan pencatatan aset saham dari LK BUN Transaksi Khusus DJKN.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada PT Karabha Digdaya sebesar Rp251.240.740.586. PT Karabha Digdaya adalah perusahaan yang berasal dari aset eks. PT PPA. Perusahaan tersebut memiliki 2 (dua) divisi usaha, yaitu pengelolaan lapangan golf (Emeralda Golf) dan pengembangan perumahan (estate) di Cimanggis, Kota Depok.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada pada PT SEG Sebesar Rp22.470.000.000. PT SEG berasal dari aset saham Eks PT PPA. Perusahaan tesebut melakukan usaha pengelolaan *real estate* serta pengembangan kawasan Danau Bogor Raya, serta pengelolaan pariwisata (*club house*) yang dikenal dengan nama “Klub Bogor Raya”.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada pada PT Aldevco sebesar Rp625.000.000. PT Aldevco berasal dari hibah Ir AR Soehoed. Saat ini, perusahaan memperoleh pendapatan operasional dari sewa Gedung Aldevco Octagon.

3. Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada Dit SMI (BLU LPDP, BP Tapera, BPDPKS)

Investasi Jangka Panjang nonpermanen pada Direktorat SMI pada 31 Desember 2023 sebesar Rp240.529.752.919.543 terdiri dari:

a. Investasi Non permanen BLU LPDP Rp140.037.133.919.543.

b. Investasi Non permanen BP Tapera Rp99.255.114.000.000.

c. Investasi Non permanen BPDPKS Rp1.237.505.000.000.

a. Investasi Non permanen BLU LPDP

Investasi jangka BLU merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari dua belas bulan dengan persetujuan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam rangka penugasan sesuai karakteristik BLU. Nilai investasi jangka panjang non permanen BLU LPDP pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp140.037.133.919.543 dan Rp119.844.502.324.242. Terjadi kenaikan Rp20.192.631.595.301 atau 16,85%, disebakan adanya pencairan Dana Abadi Pendidikan kepada BLU LPDP, dan pencairan pokok investasi

berupa amortisasi kas bagian premium Surat Utang Negara.

Rincian klasifikasi portofolio LPDP per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

No	Instrumen	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Deposito	34.292.400.229.705	35.806.595.572.854
2	Obligasi menurut harga perolehan		
	a. Obligasi Negara-HTM	103.583.483.689.838	81.956.506.751.388
	b. Obligasi Korporasi-HTM	2.161.250.000.000	2.081.400.000.000
	Total	**140.037.133.919.543**	**119.844.502.324.242**

b. Investasi Non permanen BP Tapera

Investasi Non permanen BP Tapera per 31 Desember 2023 sebesar Rp99.255.114.000.000, terdiri dari:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BP Tapera sebesar Rp60.675.114.000.000 berupa dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pengalihan dari BLU PPDPP.

2) Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BP Tapera yang berasal dari Rekening Investasi BUN pada tahun 2022 sebesar Rp19.100.000.000.000 dan pada tahun 2023 sebesar Rp19.480.000.000.000.

BP Tapera merupakan badan hukum publik (sui generis) yang dibentuk sebagai amanat Undang-Undang nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Tujuan pembentukan badan ini adalah menghimpun dan menyediakan dana murah jangka Panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BP Tapera per 31 Desember 2023 sebesar Rp99.255.114.000.000 adalah berupa dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sebelumnya saldo Dana FLPP per 31 Desember 2020 sebesar Rp42.596.006.813.852 dikelola oleh BLU PPDPP dan dicatat sebagai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Dana Bergulir. Pengalihan pengelolaan tersebut berdasarkan amanat UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun 2021 Pasal 34; PP Nomor 25 Tahun 2020 Pasal 64, PMK Nomor 111/PMK.06/2021 tentang Mekanisme Pengalihan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) kepada BP Tapera dan Penarikan Kembali Dana FLPP oleh Pemerintah; serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-1100/MK.05/2021 tanggal 6 Desember 2021 perihal Penunjukan BP Tapera sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP).

Nilai saldo awal atas pengalihan dana FLPP sebesar Rp60.675.114.000.000 berdasarkan hasil reviu BPKP. Nilai saldo tersebut didasarkan pada Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 2250/BAST-Pg.KPA/2021-Nomor BAST-07/PB.4/2021 tanggal 24 Desember 2021, dari Kuasa

Pengguna Anggaran Dana Bergulir FLPP kepada Kuasa Pengguna Anggaran Investasi Pemerintah FLPP pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penyaluran investasi Dana FLPP didasarkan Perjanjian Investasi antara Kementerian Keuangan dan BP Tapera Nomor PI-01/DSMI/2021 dan Nomor 4/PKS/BP-TPR/I/12/2021 tanggal 22 Desember 2021. Berdasarkan perjanjian tersebut antara lain mengatur:

1) Bahwa skema investasi merupakan Tabungan Pemerintah pada BP Tapera.
2) Bahwa Pemerintah berhak menarik Dana FLPP sewaktu-waktu dari BP Tapera dalam hal tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Hasil yang didapat Pemerintah adalah sebagai berikut:
    a) Sebesar imbal hasil atas pengelolaan Dana FLPP yang sedang digulirkan yaitu minimal sebesar 0,5% pertahun dari akumulasi Dana FLPP yang sedang digulirkan dikurangi dengan jasa pengelolaan Dana FLPP.
    b) Sebesar rata-rata tingkat suku bunga/margin deposito standar per tahun untuk jangka waktu 3 (tiga bulan) yang terbitkan oleh bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara yang berlaku di pasar atas pendapatan atas Dana FLPP yang belum digulirkan.
    c) Seluruh pendapatan jasa giro dan pendapatan lainnya yang diakibatkan oleh penempatan dana yang bersumber dari Dana FLPP.
4) Hasil investasi (imbal hasilnya) akan disetor ke RIBUN atas nama Rekening Lain BI Investasi Bendahara Umum Negara Nomor 513000001980 di Bank Indonesia, Jalan Thamrin, Jakarta atau nama dan/atau nomor rekening lain yang ditentukan kemudian oleh Kementerian Keuangan.

Skema penyaluran dana FLPP oleh BP Tapera menggunakan mekanisme yang sama seperti saat dikelola oleh BLU PPDPP. Pada skema dimaksud, BP Tapera menggulirkan dana melalui Bank Penyalur kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur FLPP.

Investasi Non Permanen BP Tapera Rp60.675.114.000.000 disajikan sebesar nilai perolehannya dengan pertimbangan bahwa tidak terdapat intensi permintaan penyetoran sebagian atau seluruh Dana FLPP oleh Pemerintah; merupakan investasi nonpermanen yang tidak untuk dimiliki berkelanjutan; dan bukan merupakan model bisnis investasi nonpermanen berbentuk tagihan.

Sampai dengan 31 Desember 2023 telah disalurkan dana FLPP sebesar Rp19.480.000.000.000 melalui mekanisme Rekening Investasi Bendahara Umum Negara kepada Operator Investasi Pemerintah yaitu BP Tapera. Selain itu terdapat pengembalian dana imbal hasil dari dana FLPP pada Rekening Investasi BUN dari 2022 sampai dengan akhir 2023 sebesar Rp517.756.140.530.

c. Investasi Non permanen BPDPKS

Investasi Non permanen BPDPKS per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.237.505.000.000. Investasi non permanen ini hasil reklasifikasi dari kas setara kas BLU berdasarkan nota dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor ND-370/PB.6/2024 hal Penyampaian Kebijakan Pencatatan dan Penyajian Investasi Surat Berharga Negara pada BPDPKS. Investasi

Jangka Panjang Non Permanen tersebut berasal dari penggunaan Kas BLU BPDPKS untuk perolehan surat utang negara (SUN) dengan kategori *hold-to-maturity* (HTM) yang diniatkan untuk dimiliki sampai dengan jatuh tempo selama lebih dari 12 bulan sejak perolehan.

4. Investasi Jangka Panjang Non Permanen BLU LDKPI (KPA Dit. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral)

Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya BLU LDKPI pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.000.000.000.000 dan Rp6.000.000.000.000. Nilai tersebut terdiri dari saldo awal investasi jangka Panjang non permanen lainnya sebesar Rp6.000.000.000.000, penambahan sebesar Rp2.000.000.000.000 atas pencairan dana kerja sama pembangunan internasional pada bulan Maret 2023.

Atas pencairan Dana KPI tersebut, LDKPI telah melakukan penempatan pada instrumen investasi jangka panjang dalam bentuk Surat Berharga Negara sesuai sesuai pernyataan kebijakan investasi pemerintah untuk BLU LDKPI selaku Operator Investasi Pemerintah yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK 169/KMK.05/2022 tentang pernyataan kebijakan investasi pemerintah untuk BLU LDKPI selaku Operator Investasi Pemerintah.

5. Investasi Jangka Panjang Non Permanen untuk Pinjaman PEN Daerah

Pinjaman PEN Daerah merupakan dukungan pembiayaan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program PEN.

Investasi Pemerintah tersebut ditempatkan pada PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai pengelola Pinjaman PEN Daerah sesuai dengan pasal 4, BAB II , PRJ-2/PK/2020 yang telah diubah menjadi PRJ-3/PK/2020.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen untuk Pinjaman PEN Daerah pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp21.691.657.043.349 dan Rp24.672.269.595.019. Terdapat penurunan nilai investasi sebesar Rp2.980.612.551.670 atau 12,08% dari nilai investasi tahun 2022.

Investasi pemerintah untuk pinjaman PEN Daerah yang di transfer langsung ke rekening khusus PT Sarana Multi Infrastruktur yang kemudian dikelola sebagai pinjaman PEN daerah yaitu dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program PEN. Pada tahun anggaran 2023 ini tidak ada pencairan pinjaman PEN.

D.2.1.2.4. INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN LAINNYA DIRAGUKAN REALISASINYA

Nilai Investasi jangka panjang non permanen lainnya diragukan realisasinya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp945.649.215.159 dan Rp760.196.912.027 mengalami kenaikan sebesar Rp185.452.303.132 (24,40%).

No	UNIT PENGELOLA	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Investasi nonpermanen pada Kementerian Perindustrian (SKIM-2)	4.089.232.145	4.089.232.181
2	Dit SMI	916.204.591.745	726.513.235.359
3.	IP PEN	35.312.499.997	32.262.404.302
4.	LDKPI	(9.957.108.728)	(2.667.959.815)
	JUMLAH	**945.649.215.159**	**760.196.912.027**

Investasi jangka panjang nonpermanen lainnya diragukan realisasinya terdapat pada investasi non permanen skim 2 yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian, BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), IP PEN, LDKPI, dan BPDPKS.

Kementerian Perindustrian

Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.089.232.145 dan Rp4.089.232.181, terdapat penurunan sebesar Rp36 sebagai akibat koreksi nilai investasi pada Kementerian Perindustrian. Nilai tersebut merupakan akumulasi sisa saldo pinjaman di bawah Rp50 dan saldo pinjaman bernilai negatif yang sudah tidak tercatat oleh Lembaga Pengelola Program (PT PNM dan BSM).

Direktorat SMI

Investasi jangka panjang nonpermanen lainnya diragukan realisasinya pada Direktorat SMI per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp916.204.591.745 dan Rp726.513.235.359. Nilai tersebut berasal dari penyesuaian nilai investasi jangka pangang non permanen pada BLU LPDP dan BLU BPDPKS dengan penjelasan sebagai berikut:

BLU LPDP

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Amortisasi Investasi Held to Maturity :		
- Akumulasi amortisasi Premium	(929.433.951.945)	(736.802.324.242)
- Akumulasi amortisasi Diskon	40.080.917.263	10.289.088.883
Unrealized Holding Gain/(Loss) Investasi Available for Sale	(5.780.366.587)	-
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	**(895.133.401.269)**	**(726.513.235.359)**

Mengacu PMK Nomor 169/PMK.05/2018, IJP Non-Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya meliputi akumulasi amortisasi premium Rp929.433.951.945, akumulasi amortisasi diskon

Rp40.080.917.263, dan rugi selisih kurs Rp5.780.366.587. Secara total, IJP Non-Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya disajikan di Neraca senilai Rp895.133.401.269.

BLU BPDPKS

Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya yang tercatat dalam neraca pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp21.071.190.476 dan Rp0. Nilai tersebut berasal dari amortisasi premium atas penempatan investasi jangka Panjang non permanen lainnya dalam bentuk Surat Berharga Negara yang memenuhi karakteristik HTM diperoleh secara premium.

IP PEN

Investasi jangka panjang nonpermanen lainnya diragukan realisasinya per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp35.312.499.997 dan Rp32.262.404.302 yang merupakan nilai pencadangan investasi non permanen pada perusahaan negara yang berupa pinjaman. Nilai pencadangan tersebut sebesar 0,5% dari nilai perolehan awal pinjaman, maka rinciannya adalah sebagai berikut:

Perusahaan Negara	Nilai Perolehan Awal Pinjaman	Jumlah
(1)	(2)	(3) = (2) x 0,5%
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	3.999.999.999.411	19.999.999.997
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	3.062.500.000.000	15.312.500.000
Jumlah		**35.312.499.997**

LDKPI

Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya yang tercatat dalam neraca pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar minus Rp9.957.108.728 dan minus Rp2.667.959.815. Nilai tersebut berasal dari amortisasi diskonto atas penempatan investasi jangka Panjang non permanen lainnya dalam bentuk Surat Berharga Negara.

D.2.1.2.5. INVESTASI PERMANEN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH

Nilai investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah, atau dapat disebut juga penyertaan modal Negara, per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.093.225.298.186.938 dan Rp2.909.868.558.921.828 mengalami kenaikan sebesar Rp183.356.739.265.110 (6,30%)
Investasi jangka panjang permanen PMN meliputi:

1. Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero;
2. Penyertaan Modal Pemerintah pada Perum;
3. Penyertaan Modal Luar Negeri;
4. Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Lainnya

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero	2.890.480.531.829.837	2.710.666.467.617.671
Penyertaan Modal Pemerintah pada Perum	36.912.745.897.463	33.701.371.856.008
Penyertaan Modal Luar Negeri	32.347.909.903.362	30.842.638.442.071
Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Lainnya	133.484.110.556.276	134.658.081.006.078
Total	**3.093.225.298.186.938**	**2.909.868.558.921.828**

1. PMN pada Persero

Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.890.480.531.829.837 dan Rp2.710.666.467.617.671.

Pernyataan Modal Pemerintah atau disebut juga Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Persero, merupakan kepemilikan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan mencari keuntungan dan memberikan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah ≥ 51%, sehingga Nilai PMN pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas.

PMN pada Persero dilakukan oleh 2 pihak yakni:

a. Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian BUMN

Penyertaan Modal Negara pada Persero bertujuan untuk mencari keuntungan dan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah lebih dari sama dengan 50% sehingga nilai PMN pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas.

Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian BUMN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.809.922.466.950.580 dan Rp2.634.727.723.533.045 atau terdapat peningkatan sebesar Rp175.194.743.417.535 atau 6,65%.

Peningkatan nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah dipengaruhi oleh naiknya bagian laba pemerintah dari perusahaan negara yang mengalami kenaikan kinerja sehingga mampu mencatatkan surplus operasional.

Pada tahun 2023 terdapat koreksi atas transaksi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) yang mempengaruhi nilai investasi pada persero Kementerian BUMN, yaitu koreksi mengurangi nilai investasi yang disebabkan adanya pengakuan aset pada Perusahaan Negara berdasarkan penerbitan Peraturan Pemerintah mengenai penetapan PMPP sebelum diterbitkan BAST yaitu PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebesar Rp388.564.810.000. Sesuai ketentuan pada PMK 174 Tahun 2023, perolehan dan/atau penambahan Investasi PMPP secara pertukaran atau konversi aset non kas diakui pencatatannya pada saat ditetapkan BAST atau dokumen yang dipersamakan. Sehingga atas transaksi tersebut, nilai PMPP sebesar Rp388.564.810.000 harus dikeluarkan dari ILKPN.
Nilai aset yang tercatat dalam Neraca bukan merupakan nilai aset BUMN secara keseluruhan tetapi hanya terkait investasi jangka panjang permanen yang dimiliki pemerintah.
Kepemilikan pemerintah untuk BUMN persero disajikan dalam mata uang rupiah untuk itu terhadap 4 BUMN yang menyusun Laporan Keuangan dengan mata uang asing maka akan ditranslasikan ke dalam mata uang rupiah dengan kurs Rp15.439. Empat BUMN yang

menggunakan mata Uang dollar adalah PT Pertamina, PT Garuda Indonesia, PT Krakatau Steel dan PT Dirgantara Indonesia.
Perubahan nilai investasi pada persero secara detail tersaji pada lampiran mutasi lain-lain Kementerian BUMN.

b. Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian Keuangan

Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian Keuangan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp80.558.064.879.257 dan Rp75.938.744.084.626, meningkat sebesar Rp4.619.320.794.631 atau 6,08% dari nilai per 31 Desember 2022.

Investasi ini merupakan investasi permanen penyertaan modal negara ke dalam modal Badan Usaha Milik Negara atau lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan yang dimiliki Negara Republik Indonesia. Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia diwakili dalam bentuk saham atau kuota atau merupakan bentuk kekayaan negara dipisahkan.

Badan Usaha Milik Negara/lembaga tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan alasan-alasan antara lain sebagai berikut:
1) Memiliki potensi kontijensi yang sangat tinggi terhadap APBN;
2) Sinkronisasi stimulus fiskal terhadap infrastruktur yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga.

Rincian Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian Keuangan

No	Perusahaan	Kepemilikan Pemerintah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1)	PT Sarana Multigriya Finansial	100%	18.231.142.000.000	16.320.507.000.000
2)	PT Sarana Multi Infrastruktur	100%	42.261.465.973.664	40.547.733.124.174
3)	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	100%	15.962.800.178.000	15.153.468.912.000
4)	PT Geo Dipa Energi	94,5%	4.102.656.727.593	3.917.035.048.452
5)	PT Bina Karya	100%	-	-
Total			**80.558.064.879.257**	**75.938.744.084.626**

Perubahan nilai kepemilikan pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara/Lembaga dibawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan disebabkan oleh peningkatan nilai ekuitas pada masing-masing Perusahaan dan Lembaga.

Rincian persero di bawah Kementerian Keuangan sebagai berikut :

1) PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (PT SMF) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan. PT SMF berfungsi untuk mengalirkan dana dari pasar modal ke sektor

perumahan dengan menyediakan fasilitas pinjaman, transaksi sekuritisasi, dan efisiensi pasar primer.

2) PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.75 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur. PT SMI bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur salah satunya melalui kemitraan dengan pihak swasta dan/atau lembaga keuangan multilateral.

3) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Negara Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur. PT PII bergerak di bidang penjaminan infrastruktur dalam rangka peningkatan kelayakan kredit dari proyek infrastruktur dengan skema Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS).

4) PT Geo Dipa Energi (Persero)

PT Geo Dipa Energi (Persero) (PT GDE) didirikan pada tanggal 5 Juli 2002. PT GDE memanfaatkan nilai ekonomis dan lingkungan energi panas bumi untuk menghasilkan listrik. PT GDE berupaya untuk memenuhi permintaan daya listrik nasional dengan memanfaatkan sifat-sifat hemat biaya dan lingkungan dari energi panas bumi.

5) PT Bina Karya (Persero)

PT Bina Karya (Persero) (PT BIKA) pada awalnya berbentuk Perusahaan Negara (PN) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 1962 hingga akhirnya berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sesuai Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1970. Sejak berdiri pada tahun 1962, pembinaan dan pengawasan Perseroan berada di bawah Menteri Pekerjaan Umum yang kemudian pembinaannya dialihkan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1998. Dalam rangka repurposing PT Bina Karya (Persero) menjadi Badan Usaha Otorita (BUO) Ibu Kota Nusantara, Pemerintah telah menerbitkan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Bina Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sejak diterbitkannya PP tersebut, pembinaan dan pengawasan PT BIKA berada di bawah Menteri Keuangan. Selanjutnya, Menteri Keuangan telah memberikan Kuasa Pemegang Saham kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), sesuai Surat Kuasa Nomor SKU 625.1/MK.06/2023 pada tanggal 5 Desember 2023. Pasca repurposing, saat ini PT BIKA menjalankan fungsi sebagai master developer, bussiness owner, dan operator di IKN yang digunakan OIKN sebagai vehicle dalam 4P (Percepatan Persiapan, Pembangunan dan Pemindahan) IKN dan Daerah Mitra.

PT BIKA pada periode 2023 Audited mencatatkan rugi sebesar Rp16.905.807.305, dan mencatatkan ekuitas bersaldo negatif sebesar minus Rp5.853.254.747. Berdasarkan PMK 174 tahun 2023, dalam hal terdapat nilai beban penyesuaian nilai invesatsi di LO tahun berjalan menyebabkan penyajian nilai outstanding Investasi permanen di Neraca menjadi nilai negatif (saldo buku besar Investasi kredit), maka nilai outstanding negatif tersebut tidak disajikan sebagai Investasi permanen dalam pos Investasi jangka panjang di Neraca tetapi dijelaskan secara memadai di CaLK.

2. PMN pada Perum

Penyertaan Modal Pemerintah pada Perum per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp36.912.745.897.463 dan Rp33.701.371.856.008. Terjadi kenaikan nilai investasi sebesar Rp3.211.374.041.455 (9,53%) dari tahun sebelumnya. Peningkatan nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah dipengaruhi oleh naiknya bagian laba pemerintah dari perusahaan negara yang mengalami kenaikan kinerja sehingga mampu mencatatkan surplus operasional.

Pada tahun 2023, terdapat koreksi atas transaksi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) yang mempengaruhi nilai investasi pada perum Kementerian BUMN yang disebabkan adanya pengakuan aset pada Perusahaan Negara berdasarkan penerbitan Peraturan Pemerintah mengenai penetapan PMPP sebelum diterbitkan BAST yaitu Perum LPPNI/Airnav sebesar Rp892.009.996.472. Sesuai ketentuan pada PMK 174 Tahun 2023, perolehan dan/atau penambahan Investasi PMPP secara pertukaran atau konversi aset non kas diakui pencatatannya pada saat ditetapkan BAST atau dokumen yang dipersamakan. Sehingga atas transaksi tersebut, nilai PMPP sebesar Rp892.009.996.472 harus dikeluarkan dari ILKPN.

Pernyataan Modal Pemerintah pada Perum merupakan kepemilikan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berorientasi memberikan pelayanan umum namun dengan tetap memperhatikan laba perusahaan. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Perum dinilai PMN pada Perum dihitung menggunakan metode ekuitas. BUMN berbentuk Perum semuanya dilakukan pembinaan oleh Kementerian BUMN.

3. PMN Luar Negeri

Penyertaan pada Lembaga Internasional merupakan Penyertaan Modal Negara Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp32.347.909.903.362 dan Rp30.842.638.442.071. Terjadi kenaikan nilai investasi sebesar Rp1.505.271.461.291 (4,88%) dari tahun sebelumnya.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, perubahan nilai investasi pemerintah Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) diakibatkan dari perubahan nilai tukar.

No	PMN pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Asian Development Bank (ADB)	5.977.449.868.229	5.994.088.940.672
2	International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	3.858.186.337.617	3.380.591.603.871
3	International Development Association (IDA)	1.657.356.424.865	1.240.492.799.803
4	International Finance Corporation (IFC)	4.775.359.895.000	4.467.430.130.720

No	PMN pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5	Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)	58.634.542.980	59.215.609.440
6	Islamic Development Bank (IDB)	3.413.928.173.617	3.156.174.715.225
7	International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)	31.804.340.000	32.119.520.000
8	The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)	5.100.643.571	5.114.841.930
9	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	1.357.999.001.000	1.324.680.728.000
10	Common Fund for Commodities (CFC)	19.703.156.520	19.753.827.346
11	The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)	343.402.219.963	346.805.325.064
12	Credit Guarantee and Investment Facility	472.433.400.000	336.787.200.000
13	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	10.376.551.900.000	10.479.383.200.000
JUMLAH		**32.347.909.903.362**	**30.842.638.442.071**

Perubahan nilai Investasi Pemerintah pada LKI dalam rupiah berasal dari:

a. Penambahan investasi pemerintah tahun berjalan pada 6 LKI, yaitu IFAD, IDA, IsDB, IFC, CGIF, dan IBRD senilai Rp1.559.632.528.929;

b. Selisih lebih hasil konfirmasi senilai Rp169.063.304.338 berasal dari IBRD, IDA, dan IsDB; dan

c. Beban Selisih Kurs yang belum terealisasi senilai Rp223.424.371.977.

4. PMN pada Badan Usaha Lainnya

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp133.484.110.556.276 dan Rp134.658.081.006.078.

Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya terdiri dari :

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Penyertaan pada Badan Usaha lainnya (UAKPA DJKN)	125.073.797.670.565	126.412.765.043.554
Penyertaan pada Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (UAKPA Dit EAS DJPPR)	625.792.238	614.509.198
Penyertaan pada Perusahaan (Minoritas) Dalam Negeri (UAKPA Kementerian BUMN)	1.737.793.416.650	1.776.283.441.533
Penyertaan Badan Usaha Lainnya Luar Negeri (UAKPA BKF)	1.914.436.000.000	1.933.408.000.000
Penyertaan Pada BP Tapera (UAKPA Dirjen Pembiayaan)	2.794.889.273.282	2.740.175.360.701
Bank Tanah (UAKPA Dirjen Pengadaaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan)	1.962.568.403.541	1.794.834.651.092
JUMLAH	**133.484.110.556.276**	**134.658.081.006.078**

a. UAKPA DJKN

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Lainnya pada UAKPA DJKN terdiri dari Penyertaan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Tuban Petrochemical Industries (PT TPI) dan Lembaga Pengelola Investasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp125.073.797.670.565 dan Rp126.412.765.043.554.

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (UAKPA DJKN)	8.761.466.000.000	26.868.244.000.000
PT. Tuban Petrochemical Industries (TPI)	2.582.402.670.565	2.598.680.043.554
Lembaga Pengelola Investasi	113.729.929.000.000	96.945.841.000.000
Total	**125.073.797.670.565**	**126.412.765.043.554**

Nilai aset yang tercatat dalam Neraca tersebut bukan merupakan nilai aset Lembaga/Badan usaha secara keseluruhan tetapi hanya terkait investasi jangka panjang permanen yang dimiliki pemerintah.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Sebelumnya dikenal dengan nama Bank Ekspor Indonesia (BEI), merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional. Selain itu, lembaga ini berwenang dalam menetapkan skema pembiayaan ekspor nasional, melakukan restrukturisasi pembiayaan ekspor nasional, melakukan reasuransi terhadap asuransi yang dilaksanakan di dalam skema, serta melakukan penyertaan modal.

Nilai penyertaan Pemerintah pada LPEI per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp8.761.466.000.000 dan Rp26.868.244.000.000, mengalami penurunan sebesar Rp18.106.778.000.000.

PT Tuban Petrochemical Industries (PT TPI)

Nilai penyertaan Pemerintah pada PT TPI per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp2.582.402.670.566 dan Rp2.598.680.043.554 mengalami penurunan sebesar Rp16.277.372.989 dikarenakan PT TPI membukukan kerugian.

PT TPI didirikan pada 16 Maret 2001, pada awalnya, BPPN adalah pemilik 70% saham PT TPI dan sisanya dikuasai oleh Grup Tirtamas Majutama. Pengakhiran tugas BPPN pada 2004, mengakibatkan beralihnya kepemilikan 70% saham kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA). Pada tahun 2019, komposisi kepemilikan saham TubanPetro berubah dikarenakan adanya konversi MYB menjadi saham yang dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Tuban Petrochemical Industries. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan penambahan modal saham melalui right issue yang seluruhnya diambil oleh PT Pertamina (Persero), sehingga struktur kepemilikan TubanPetro terdiri dari PT Pertamina (Persero) (51%), Kementerian Keuangan Republik Indonesia (46,99%) dan PT Pertamina Pedeve Indonesia (2%) per 27 November 2019.

Pada November 2022 terdapat penambahan modal saham oleh pemegang saham lain yaitu PT Pertamina (Persero) ke dalam ekuitas PT TPI. Dengan adanya penambahan modal oleh pemegang saham lainnya tersebut, persentase kepemilikan saham oleh Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan mengalami penururan dari 46,99% menjadi 35,23%.

Lembaga Pengelola Investasi

Lembaga Pengelola Investasi ("LPI/INA") didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Paragraf 2 Pasal 165 yang ditetapkan pada tanggal 2 November 2020 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi. ruang lingkup kegiatan INA terutama meliputi mengelola investasi dan merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi investasi. Pemerintah Indonesia adalah entitas induk dan pemegang saham pengendali INA. INA bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia.

Nilai penyertaan Pemerintah pada LPI/INA per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp113.729.929.000.000 dan Rp96.945.841.000.000 mengalami peningkatan sebesar Rp16.784.088.000.000.

Badan Usaha Milik Negara/Lembaga terkecuali PT TPI dan INA (hanya pembinaannya saja yang berada di bawah Kemenkeu), seluruhnya berada di bawah pengawasan dan pembinaan Kementerian Keuangan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan alasan-alasan antara lain sebagai berikut:

- Memiliki potensi kontijensi yang sangat tinggi terhadap APBN;
- Sinkronisasi stimulus fiskal terhadap infrastruktur yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga.
- Salah satu fiscal tools yang digunakan dalam penentuan kebijakan fiscal oleh Menteri Keuangan.

b. UAKPA Dit EAS DJPPR

Perusahaan Penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN. Perusahaan yang akan menerbitkan SBSN adalah perusahaan yang secara khusus dibentuk guna kepentingan penerbitan SBSN (*special purpose vehicle*-SPV)

Nilai penyertaan Pemerintah pada Perusahaan Penerbit SBSN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp625.792.238 dan Rp614.509.198, mengalami peningkatan sebesar Rp11.283.040.

Jumlah Investasi Jangka Panjang merupakan jumlah saldo penyertaan modal pemerintah pada badan usaha lainnya sejak tahun 2008 yang didepositokan dalam deposito mudharabah pada Bank Mandiri Syariah Cabang Jakarta Thamrin.

c. UAKPA Kementerian BUMN

PMP pada Perseroan Terbatas Lainnya (minoritas) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.737.793.416.650 dan Rp1.776.283.441.533.

PMN pada Non BUMN merupakan kepemilikan Negara pada perusahaan dengan persentase kepemilikan Negara kurang dari sama dengan 50%. Nilai PMN pada Non BUMN dihitung menggunakan metode ekuitas atau metode biaya.

Metode ekuitas digunakan untuk Non BUMN yang kepemilikannya sebesar lebih dari sama dengan 20%. Adapun metode biaya digunakan untuk Non BUMN yang kepemilikannya di bawah 20%.

Non BUMN yang dimiliki oleh Pemerintah saat ini dinilai dengan menggunakan metode biaya. Adapun Non BUMN yang dimiliki oleh Pemerintah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

1) PT Perkebunan Nusantara I (10.58%);
2) PT Perkebunan Nusantara IV (7,07%);
3) PT Nindya Karya (0%);
4) PT Rekayasa Industri (4,97%);
5) PT PANN Pembiayaan Maritim (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
6) PT Indosat Tbk (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
7) PT Asean Bintulu Fertilizer (13%);
8) PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
9) PT Timah Tbk (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
10) PT Aneka Tambang Tbk (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
11) PT Perusahaan Gas Negara Tbk (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
12) PT Istaka Karya (7,66%);
13) PT Kimia Farma Tbk (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
14) PT Indofarma Tbk (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
15) PT Asuransi Jasa Indonesia (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
16) PT Jasa Raharja (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
17) PT Jaminan Kredit Indonesia (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
18) PT Asuransi Kredit Indonesia (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
19) PT Energy Management Indonesia (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
20) PT Pegadaian (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
21) PT Permodalan Nasional Madani (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
22) PT Hotel Indonesia Natour (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
23) PT Sarinah (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
24) PT TWC BP dan RB (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
25) PT Angkasa Pura I (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A

26) PT Angkasa Pura II (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
27) PT Sucofindo (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
28) PT Surveyor Indonesia (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
29) PT Perikanan Indonesia (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
30) PT Berdikari (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
31) PT Sang Hyang Seri (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
32) PT Garam (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
33) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
34) PT Kawasan Berikat Nusantara (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
35) PT Kawasan Industri Wijayakusuma (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
36) PT Kawasan Industri Medan (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
37) PT Kawasan Industri Makassar (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
38) PT Balai Pustaka (0,01%), Pemerintah RI memiliki saham seri A
39) PT Kliring Berjangka Indonesia (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
40) PT Perusahaan Pengelola Aset (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
41) PT Dahana (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
42) PT Pindad (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
43) PT Dirgantara Indonesia (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
44) PT PAL Indonesia (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
45) PT Industri Nuklir Indonesia (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
46) PT Semen Baturaja Tbk (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
47) PT Bank Syariah Indonesia Tbk (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
48) PT Indonesia Asahan Aluminium (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
49) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (0%); Pemerintah memiliki saham seri A

Kementerian BUMN menggabungkan 13 perusahaan di bawah holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) menjadi dua subholding yakni PalmCo dan SupportingCo. Menteri BUMN melalui surat Nomor S-595/MBU/11/2023 tangggal 28 November 2023 perihal Persetujuan atas Integrasi PTPN Grup telah menyetujui:

1) Pemisahan tidak murni (spin off) usaha perkebunan kelapa sawit dan karet PT PTPN III (Persero) dengan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva bisnis kelapa sawit dan karet PT PTPN III (Persero) kepada PT PTPN IV;

2) Penambahan penyertaan modal PT PTPN III (Persero) kepada PT PTPN IV sebanyak 2.456.849 saham atau seluruhnya sebesar Rp2.456.849.000.000,- atau setara dengan 2,93% saham dalam PT PTPN IV sebagai kompensasi dari pemisahan tidak murni;

3) Penggabungan PTPN V, PTPN VI dan PTPN XIII ke dalam PTPN IV (Sub Holding PalmCo); serta

4) Penggabungan PTPN II, PTPN VII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, dan PTPN XIV ke dalam PTPN I (Sub Holding SupportingCo).

Pada Non BUMN dengan kepemilikan Negara dengan metode biaya, nilai penyertaan negara pada Non BUMN tersebut tetap, sepanjang tidak ada penambahan penyertaan yang dilakukan Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, nilai kepemilikan negara pada Non BUMN tersebut tidak tergantung pada status laporan keuangan Non BUMN tersebut, atau perubahan ekuitas.

d. UAKPA BKF

PMP Badan Usaha Lainnya pada UAKPA BKF merupakan Penyertaan pada ASEAN Infrastructure Fund (AIF) dan International Rubber Consortium Limited (IRCo). Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 nilai Penyertaan Modal Pemerintah pada AIF dan IRCo sebesar Rp1.914.436.000.000 dan Rp1.933.408.000.000, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp18.972.000.000 atau 0,98% yang berasal dari pendapatan selisih Kurs yang belum terealisasi dengan rincian sebagai berikut.

LKI	Nilai Investasi per 31 Desember 2023	Nilai Investasi per 31 Desember 2022	Selisih KURS
ASEAN Infrastructure Fund (AIF)	1.852.680.000.000	1.871.040.000.000	(18.360.000.000)
International Rubber Consortium Limited (IRCo)	61.756.000.000	62.368.000.000	(612.000.000)
Jumlah	**1.914.436.000.000**	**1.933.408.000.000**	**(18.972.000.000)**

e. UAKPA Dirjen Pembiayaan

BP Tapera merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang telah diundangkan pada tanggal 24 Maret 2016, BP Tapera ditetapkan dengan tujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. BP Tapera bertanggungjawab kepada Komite Tapera (yang terdiri dari Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan unsur profesional).

BP Tapera memperoleh modal awal yang bersumber dari APBN yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Modal Awal BP Tapera diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2018 tentang Modal Awal BP Tapera.

Posisi penyertaan pada BP Tapera pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.794.889.273.282 dan Rp2.740.175.360.701, terjadi kenaikan sebesar Rp54.713.912.581 atau 2%.

f. UAKPA Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Bank Tanah)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah yang telah diundangkan pada tanggal 29 April 2021. Bank Tanah ditetapkan dengan tujuan mengelola tanah dengan fungsi untuk melaksanakan perencanaan perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.

Badan Bank Tanah adalah badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk diberi kewenangan khusus dalam mengelola tanah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Komite yang terdiri dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sedangkan Kepala dan Deputi Badan Pelaksana Bank Tanah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komite Bank Tanah Nomor 04/SK/Kom-BTI/XII/2021 dengan susunan sebagai berikut:

1) Kepala Badan Pelaksanaan Bank Tanah;
2) Deputi Bidang Perencanaan Strategi dan Pengadaan Tanah; dan
3) Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Keuangan.

Kepala Badan Pelaksana dan Deputi bertanggung jawab kepada Komite Badan Bank Tanah.

Badan Bank Tanah memperoleh modal awal yang bersumber dari APBN yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Modal Awal Badan Bank Tanah diatur melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Posisi penyertaan pada Badan Bank Tanah pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.962.568.403.541 dan Rp1.794.834.651.092. Terjadi kenaikan nilai investasi sebesar Rp167.733.752.449 atau 9,35% yang salah satunya dikarenakan adanya keuntungan/surplus operasional dan dampak kumulatif perubahan kebijakan dalam pos lain-lain.

D.2.1.2.6. INVESTASI PERMANEN BADAN LAYANAN UMUM

Nilai investasi jangka panjang permanen BLU per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp8.053.004.500 dan Rp8.958.055.146, terjadi penurunan nilai investasi sebesar Rp905.050.646 atau 10,10% dari nilai investasi per 31 Desember 2022.

No	BLU	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	UIN Sumatera Utara Medan	1.415.810.000	2.320.860.646
2	PPK Gelora Bung Karno	6.637.194.500	6.637.194.500
	Jumlah	**8.053.004.500**	**8.958.055.146**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (PP Nomor 74/2012), BLU tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan. Selain itu, investasi merupakan kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Oleh karena itu, semua investasi jangka panjang yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum akan dicatat dan dilaporkan pada Laporan Keuangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, tidak dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Kementerian

Negara/Lembaga yang menjadi induk Satuan Kerja Badan Layanan Umum. Investasi permanen BLU terdapat pada BLU Pengelola Kawasan dan BLU Pelayanan Pendidikan. Adapun rincian investasi adalah sebagai berikut:

1. Penyertaan modal oleh BLU PPK Gelora Bung Karno (Sekretariat Negara) pada PT Senayan Trikarya Sempana (PT STS) dengan porsi kepemilikan sebesar 10% dengan nilai sebesar Rp6.637.194.500. Tidak ada perubahan nilai kepemilikan BLU PPK Gelora Bung Karno pada PT STS karena penyertaan BLU PPK Gelora Bung Karno dicatat dengan metode biaya.
2. BLU Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan memiliki penyertaan pada PT BPRS Paduarta Insani dengan kepemilikan sebanyak 3.518 lembar saham seri A dan 30.348 lembar saham seri B. Pada tahun 2019 terdapat penerbitan saham baru dari BPRS yang tidak diambil bagian oleh UIN Sumatera Utara sehingga persentase kepemilikan sahamnya turun atau terdilusi dari 30,82% menjadi 22,82%. Saldo investasi permanen BLU Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan per 31 Desember 2023 tersebut merupakan hasil perhitungan Nilai Investasi Permanen dengan menggunakan metode ekuitas dimana laba BPRS dikalikan langsung dengan porsi saham UIN SU Medan dikurangi penarikan deviden Tahun 2020 dan koreksi Penyesuaian dengan aktual saham di BPRS Puduarta Insani berdasarkan Laporan Auditor Independen Tahun 2022 yang diterbitkan tanggal 15 Mei 2023.

D.2.1.2.7. INVESTASI PERMANEN LAINNYA

Nilai Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp686.539.843.221.699 dan Rp597.102.851.922.346, terjadi kenaikan nilai investasi sebesar Rp89.436.991.299.353 atau 14,98% dari nilai investasi per 31 Desember 2022.

Investasi Permanen Lainnya terdiri dari:

No	Investasi Permanen Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Penyertaan Modal Negara pada Bank Indonesia	401.109.298.000.000	348.428.929.000.000
2	Penyertaan Modal Negara pada Otorita/Lembaga Penjamin Simpanan	211.972.301.807.000	186.024.447.070.000
3	Penyertaan Modal Negara Lain-lain	73.458.243.414.699	62.649.475.852.346
	Jumlah	**686.539.843.221.699**	**597.102.851.922.346**

1. Penyertaan Modal Negara pada Bank Indonesia

Nilai Penyertaan Modal Negara pada Bank Indonesia per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp401.109.298.000.000 dan Rp348.428.929.000.000. Terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp52.680.369.000.000 yang berasal dari surplus BI dan selisih revaluasi.

Sesuai dengan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, modal Bank Indonesia merupakan kekayaan negara dipisahkan. Oleh karena itu, modal Bank Indonesia dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen pada Laporan Keuangan BA 999.03.

Dengan mulai efektifnya Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/13/PDG/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia, mulai tahun 2014 Bank Indonesia tidak

lagi menyajikan subklasifikasi ekuitas di Laporan Posisi Keuangan dan tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen laporan keuangan.

Bank Indonesia berpandangan bahwa Bank Indonesia sebagai entitas independen menempatkan seluruh pemangku kepentingan pada prioritas yang setara, selain itu Bank Indonesia beraktivitas bukan untuk memperoleh keuntungan atau laba, sehingga penyusunan laporan keuangan Bank Indonesia bukan ditujukan untuk mengetahui kekayaan bersih (*net worth*).

Selain itu, Bank Indonesia juga tidak menyajikan Laporan Arus Kas karena keberhasilan Bank Indonesia dalam mencapai tujuan tidak tercermin dari kemampuan menghasilkan kas masa depan. Kewenangan Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga *sui generis* yang dapat mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah menyebabkan laporan arus kas tidak relevan karena Bank Indonesia tidak memiliki kendala dalam menghasilkan arus kas.

Dalam menghadapi perubahan kebijakan ini, DJKN dalam menentukan nilai penyertaan Pemerintah pada Bank Indonesia menggunakan pendekatan menjumlahkan sub-sub akun yang pada laporan keuangan Bank Indonesia tahun sebelumnya menjadi komponen ekuitas antara lain:

a. Selisih Revaluasi.
b. Modal.
c. Akumulasi Surplus/Defisit yang terdiri dari:
    1) Cadangan Umum;
    2) Cadangan Tujuan;
    3) Surplus/Defisit Tahun berjalan.

2. Penyertaan Modal Negara pada Lembaga Penjamin Simpanan

Nilai Penyertaan Modal Negara pada Lembaga Penjamin Simpanan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp211.972.301.807.000 dan Rp186.024.447.070.000. Terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp25.947.854.737.000 yang berasal dari Surplus LPS dan pendapatan komprehensif lainnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, modal Lembaga Penjamin Simpanan merupakan kekayaan negara dipisahkan. Oleh karena itu, modal Lembaga Penjamin Simpanan dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen pada Laporan Keuangan BA 999.03.

3. Penyertaan Modal Negara Lain-lain

Investasi Lain-lain terdiri dari Penyertaan pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Nilai penyertaan modal Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp73.458.243.414.699 dan Rp62.649.475.852.346.

Adapun rincian investasi lain-lain disajikan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Institut Pertanian Bogor	2.910.480.548.431	2.795.117.983.603
2	Universitas Airlangga	3.386.481.519.574	3.379.522.194.212
3	Institut Teknologi Bandung	2.137.070.933.465	2.284.725.176.268
4	Universitas Indonesia	4.791.021.213.806	4.598.356.448.112
5	Universitas Gajah Mada	4.459.932.986.932	4.432.725.547.821
6	Universitas Pendidikan Indonesia***	1.142.149.933.752	1.052.744.544.568
7	Universitas Sumatera Utara	1.898.360.166.970	1.891.943.149.520
8	Universitas Padjajaran	1.346.990.132.123	1.285.257.997.803
9	Universitas Diponegoro	4.086.012.209.150	3.651.496.953.823
10	Universitas Hassanudin	2.492.172.787.826	2.436.270.624.650
11	Institut Teknologi Sepuluh November	1.879.170.650.603	1.660.405.319.649
12	Universitas Negeri Sebelas Maret	1.706.907.381.088	1.686.700.442.024
13	Universitas Negeri Malang	1.954.637.430.081	1.881.508.119.086
14	Universitas Andalas	1.278.810.808.160	1.241.583.274.047
15	Universitas Brawijaya	3.610.213.266.894	3.529.459.226.043
16	Universitas Negeri Padang***	1.358.228.340.297	1.266.801.389.980
17	Universitas Syah Kuala***	1.528.961.186.361	-
18	Universitas Terbuka***	3.675.028.228.668	-
19	Universitas Negeri Surabaya	1.765.447.318.340	-
20	Universitas Negeri Yogyakarta***	1.452.469.064.422	-
21	Universitas Negeri Semarang***	1.868.130.629.320	-
22	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	10.289.025.406.713	10.753.648.947.992
23	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	12.440.541.271.726	12.821.208.513.150
	Jumlah	**73.458.243.414.702****	**62.649.475.852.351***

**Selisih Rp5 karena pembulatan*
***Selisih Rp3 karena pembulatan*
****Menggunakan angka LK Semester II 2023*

a. PTN BH

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi diatur bahwa Perguruan Tinggi eks BHMN yang sudah menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum dan harus mengikuti ketentuan tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak aturan tersebut diundangkan. Hingga saat ini 21 Perguruan Tinggi eks BHMN tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Rincian Penetapan statuta PTN BH adalah sebagai berikut:

1) Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
2) Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor;
3) Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada;
4) Universitas Indonesia (UI) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
5) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6) Universitas Sumatera Utara (USU) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
7) Universitas Airlangga (UNAIR) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga;
8) Universitas Padjajaran (UNPAD) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjajaran;
9) Universitas Diponegoro (UNDIP) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
10) Universitas Hasanuddin (UNHAS) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
11) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
12) Universitas Sebelas Maret (UNS) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
13) Universitas Andalas (UNAND) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas;
14) Universitas Brawijaya (UB) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya; dan
15) Universitas Negeri Padang (UNP) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang;

16) Universitas Negeri Malang (UNM) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang.

17) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta.

18) Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang.

19) Universitas Negeri Surabaya (UNESA) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya.

20) Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala.

21) Universitas Terbuka (UT) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka.

Dalam PP penetapan masing-masing PTNBH tersebut telah diamanatkan bahwa kekayaan awal dari PTNBH akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nilai kekayaan awal PTNBH yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan menjadi dasar pencatatan pada Laporan Keuangan BUN 999.03. Per 31 Desember 2023, Menteri Keuangan telah menetapkan KMK Penetapan Nilai Kekayaan Awal (PNKA) pada 21 PTNBH yang dicatat dalam Laporan Keuangan BUN BA 999.03 Lingkup UAIP. Sementara itu, terdapat satu PTNBH, yakni PTNBH Universitas Islam Internasional Indonesia, yang belum ditetapkan kekayaan awalnya oleh Menteri Keuangan dikarenakan masih menunggu penyelesaian proses hibah dari Kementerian Agama kepada PTNBH Universitas Islam Internasional Indonesia.

b. BPJS

Investasi pada BPJS merupakan penyertaan negara pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Sesuai Pasal 41 UU BPJS yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah PP Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, bahwa sumber aset BPJS Kesehatan diantaranya adalah modal awal dari pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham serta hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

Untuk melaksanakan amanat UU dan PP tersebut, pada akhir tahun 2013 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2013 tentang Modal Awal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang pada salah satu pasalnya menetapkan nilai

kekayaan awal BPJS sebesar Rp500.000.000.000 berbentuk uang tunai dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013.

Adapun modal yang bersumber dari hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan yaitu bersumber dari PT Askes (Persero) pada tanggal 1 Januari 2014 sebesar Rp9.151.813.376.805 sehingga total modal BPJS adalah sebesar Rp9.151.813.376.805. Jumlah tersebut telah disahkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Nomor 510/KMK.06/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Pembuka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Laporan Posisi Keuangan Pembuka Dana Jaminan Sosial per 1 Januari 2014.

Selain membentuk BPJS Kesehatan, Pemerintah RI juga membentuk BPJS Ketenagakerjaan. Modal BPJS Ketenagakerjaan berasal dari pengalihan aset dan liabilitas PT Jamsostek (Persero) sebesar Rp7.323.338.452.469 sebagaimana tercantum dalam LK Penutup PT Jamsostek (Persero) per 31 Desember 2013 dan modal awal dari pemerintah yang merupakan kekayaan negara dipisahkan dan tidak terbagi atas saham sebesar Rp500.000.000.000 sesuai PP Nomor 83 Tahun 2013.

Nilai investasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 pada BPJS Kesehatan adalah sebesar Rp10.289.025.406.713 dan Rp10.753.648.947.992. Sedangkan nilai investasi pada BPJS ketenagakerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.440.541.271.726 dan Rp12.821.208.513.150.

D.2.1.3 ASET TETAP

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.992.870.470.567 dan Rp1.897.913.071.793 mengalami kenaikan sebesar Rp94.957.398.774 (5,00%). Jumlah tersebut merupakan nilai bruto sebelum dikurangi akumulasi penyusutan, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Tanah	26.594.107.000	26.594.107.000
Peralatan dan Mesin	419.497.435.733	524.353.291.311
Gedung dan Bangunan	60.946.355.841	43.006.647.389
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.401.969.922.187	1.225.899.884.858
Aset Tetap Lainnya	47.793.132.611	44.013.820.603
Konstruksi Dalam Pengerjaan	36.069.517.195	34.045.320.632
Jumlah Aset Tetap	**1.992.870.470.567**	**1.897.913.071.793**

D.2.1.3.1. TANAH

Saldo tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp26.594.107.000 dan Rp26.594.107.000. Tidak ada perubahan dalam nilai sepanjang tahun 2023. Tanah tersebut terdapat pada Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Aset berupa tanah tersebut terletak di Jalan Simpang Parit Rampak – Simpang PT Saipem Kabupaten Karimun, seluas 113.794 m^2.

D.2.1.3.2. PERALATAN DAN MESIN

Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp419.497.435.733 dan Rp524.353.291.311. Terdapat penurunan sebesar Rp104.855.855.578 atau 20,00%. Perbandingan peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2023	31 Desember 2022
112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	18.354.277.323	16.532.139.573
-	Otoritas Jasa Keuangan	241.568.251.266	356.903.989.237
-	SKK Migas	159.574.907.144	150.917.162.501
Total		**419.497.435.733**	**524.353.291.311**

Mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin tersebut sebagai berikut.

Saldo Awal	**524.353.291.311**
Penambahan :	**11.102.594.165**
Saldo Awal (Penambahan)	59.643.582
Pembelian	3.049.652.290
Reklasifikasi Masuk	374.167.340
Perolehan Lainnya	6.975.187.773
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	448.989.450
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	65.499.730
Pengembangan Melalui KDP	107.920.000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	21.534.000
Pengurangan:	**(115.946.137.743)**
Transfer Keluar	(13.660.189.343)
Reklasifikasi Keluar	(551.362.190)
Hibah Keluar	(58.823.597.774)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(42.911.594.436)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	6.156.000
Koreksi Pencatatan	(5.550.000)
Saldo per 31 Desember 2023	**419.509.747.733**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	**(376.084.368.556)**
Nilai buku per 31 Desember 2023	**43.425.379.177**

D.2.1.3.3. GEDUNG DAN BANGUNAN

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp60.946.355.841 dan Rp43.006.647.389, mengalami kenaikan sebesar Rp17.939.708.452 atau 41,71%. Nilai gedung dan bangunan tersebut berasal dari BP Batam. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Saldo Awal	**43.006.647.389**
Penambahan :	**34.616.915.490**
Pembelian	16.725.857.015
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	14.763.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	17.876.295.475
Pengurangan	**16.677.207.038**
Koreksi Pencatatan	16.677.207.038
Saldo per 31 Desember 2023	**60.946.355.841**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	**(2.459.771.970)**
Nilai buku per 31 Desember 2023	**58.486.583.871**

D.2.1.3.4. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Saldo jalan, irigasi, dan jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.401.969.922.187 dan Rp1.225.899.884.858. Perbandingan jalan, irigasi, dan jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

(dalam Rupiah)

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2023	31 Desember 2022
112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1.401.953.831.687	1.225.883.794.358
-	SKK Migas	16.090.500	16.090.500
Total		**1.401.969.922.187**	**1.225.899.884.858**

Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Saldo Awal	**1.225.899.884.858**
Penambahan :	**177.351.587.829**
Pembelian	762.070.500
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	176.070.037.329
Reklasifikasi Masuk	381.035.250
Internal Transfer Masuk	138.444.750
Pengurangan :	**1.281.550.500**
Koreksi Pencatatan	762.070.500
Iinternal Transfer Keluar	138.444.750
Reklasifikasi Keluar	381.035.250
Saldo per 31 Desember 2023	**1.401.969.922.187**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	**(496.303.090.407)**
Nilai buku per 31 Desember 2023	**905.666.831.780**

D.2.1.3.5. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp47.793.132.611 dan Rp44.013.820.603, mengalami kenaikan sebesar Rp3.779.312.008 atau 8,59%. Perbandingan aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

(dalam Rupiah)

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2023	31 Desember 2022
112	BP Batam	1.349.159.900	469.663.900
-	Otoritas Jasa Keuangan	0	997.877.346
-	SKK Migas	46.443.972.711	42.546.279.357
Total		**47.793.132.611**	**44.013.820.603**

Mutasi aset tetap lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Saldo Awal	**44.013.820.603**
Penambahan :	**6.633.868.159**
Saldo Awal	49.519.000
Pembelian	998.738.993
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	5.166.451.799
Perolehan Lainnya	329.721.868
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	89.436.499
Pengurangan:	**2.854.556.151**
Penghapusan	1.298.073.575
Hibah Keluar	997.877.346
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	413.411.730
Koreksi Pencatatan	145.193.500
Saldo per 31 Desember 2023	**47.793.132.611**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	**(14.330.272.633)**
Nilai buku per 31 Desember 2023	**33.462.859.978**

D.2.1.3.6. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp36.069.517.195 dan Rp34.045.320.632, mengalami kenaikan sebesar Rp2.024.196.563 atau 5,95%. KDP tersebut terdapat pada BP Batam. Mutasi KDP tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Saldo Awal	**34.045.320.632**
Penambahan :	**206.671.566.776**
Saldo Awal KDP	104.333.340
Perolehan/Penambahan KDP	26.902.836.215
Pengembangan KDP	157.273.639.863
Koreksi Nilai KDP Bertambah	4.955.761.230
Perolehan Lainnya KDP	17.294.581.128
Reklasifikasi Masuk KDP	140.415.000
Pengurangan	**(204.647.370.213)**
Koreksi Nilai KDP Berkurang	(1.453.972.660)
Penghapusan/Penghentian KDP	(3.067.899.000)
Reklasifikasi Keluar KDP	(140.415.000)
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	(199.561.774.053)
Pengembangan Melalui KDP	(106.560.000)
Koreksi Pencatatan KDP	(316.749.500)
Saldo per 31 Desember 2023	**36.069.517.195**
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2023	**-**
Nilai buku per 31 Desember 2023	**36.069.517.195**

D.2.1.3.7. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp889.177.503.566 dan Rp851.110.966.065, mengalami kenaikan sebesar Rp38.066.537.501 atau (4,47%). Akumulasi penyusutan terdiri dari:

1. Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp376.084.368.556;
2. Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp2.459.771.970;
3. Akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp496.303.090.407;
4. Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya sebesar Rp14.330.272.633.

Perbandingan akumulasi penyusutan aset per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut.

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2023	31 Desember 2022
112	BP Batam		
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	13.858.937.984	12.200.111.697
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.459.771.970	1.423.127.498
	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	496.295.849.682	364.348.186.402
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	37.438.464	32.854.617
-	Otoritas Jasa Keuangan		
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	241.450.771.434	356.534.434.202
-	SKK Migas		
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	120.774.659.138	102.382.186.684
	Akumulasi Penyusutan Jaringan	7.240.725	5.631.675
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	14.292.834.169	14.184.433.290
Total		**889.177.503.566**	**851.110.966.065**

D.2.1.4. PROPERTI INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau meningkatkan nilai aset atau keduanya. Saldo Properti Investasi (setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan) per 31 Desember 2023 sebesar Rp32.335.552.112.417 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp31.062.733.305.865, terjadi kenaikan sebesar Rp1.272.818.806.552 atau 4,10 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022.

Adapun perbandingan Properti Investasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:

No	BA BUN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	999.03	11.303.263.278.101	11.818.390.416.850
	Properti Investasi	30.273.971.040.544	29.999.078.894.081
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(18.970.707.762.443)	(18.180.688.477.231)
2.	999.99	21.032.288.834.316	19.244.342.889.015
	Properti Investasi	57.855.246.424.044	55.205.201.266.787
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(36.822.957.589.728)	(35.960.858.377.772)
Total		**32.335.552.112.417**	**31.062.733.305.865**

D.2.1.4.1. PROPERTI INVESTASI

D.2.1.4.1.1. PROPERTI INVESTASI PADA BA 999.03

Posisi Properti Investasi dalam kelolaan LMAN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp30.273.971.040.544 dan Rp29.999.078.894.081 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp18.970.707.762.443 dan Rp18.180.688.477.231 sehingga nilai Properti Investasi bersih adalah sebesar Rp11.303.263.278.101 dan Rp11.818.390.416.850.

Rincian Properti Investasi per kelompok aset menurut penyerahkelolaan secara komparatif pada 31 Desember 2023 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Kelompok Aset Penyerahkelolaan	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Bersih
Properti Investasi eks BPPN	666.705.946.785	405.466.565	666.300.480.220
Properti Investasi eks PPA	614.761.665.481	54.658.307.197	560.103.358.284
Properti Investasi eks Pertamina	28.027.050.534.100	18.890.126.863.729	9.136.923.670.371
Properti Investasi eks HTBI	751.516.108.628	20.899.716.138	730.616.392.490
Properti Investasi Lainnya	213.936.785.550	4.617.408.814	209.319.376.736
Total Properti Investasi	**30.273.971.040.544**	**18.970.707.762.443**	**11.303.263.278.101**

1. Properti Investasi eks BPPN

Posisi Properti Investasi eks BPPN pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp666.705.946.785 dengan akumulasi penyusutan Rp347.137.849. Nilai bersih dari Properti Investasi eks BPPN adalah sebesar Rp666.358.808.936. Penyajian pos Properti Investasi eks BPPN sejak tahun pelaporan 2022 berasal dari implementasi PSAP 17 Properti Investasi.

Rincian Properti Investasi eks BPPN per klasifikasi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Posisi 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31 Desember 2023
Tanah	597.340.142.000	54.646.076.000	-	651.986.218.000
Gedung dan Bangunan	2.127.724.000	12.832.822.248	(309.000.000)	14.651.546.248
Properti Investasi dalam Pengerjaan	106.169.280	309.000.000	(346.986.743)	68.182.537
Total Properti Investasi	**599.574.035.280**	**67.787.898.248**	**(655.986.743)**	**666.705.946.785**

Mutasi Properti Investasi eks BPPN pada tahun 2023 dirinci sebagai berikut:

a. Mutasi tambah dirinci sebagai berikut:

- Penyerahkelolaan dan selisih lebih penilaian wajar (capital gain) tanah total sebesar Rp54.646.076.000.
- Penyerahkelolaan, selisih lebih penilaian wajar (capital gain), pengeluaran dana untuk upgrade asset, kapitalisasi retensi, dan pendetilan KDP total sebesar Rp12.832.822.248.
- Koreksi kurang saji KDP tahun 2022 sebesar Rp309.000.000.

b. Mutasi kurang dirinci sebagai berikut:

- Koreksi kurang saji KDP tahun 2022 sebesar Rp309.000.000.
- Pendetilan KDP sebesar Rp346.986.743.

2. Properti Investasi eks PPA

Posisi Properti Investasi eks PPA pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp614.761.665.481 dengan total akumulasi penyusutan Rp54.658.307.197. Nilai bersih Properti Investasi eks PPA adalah sebesar Rp560.103.358.284. Penyajian pos Properti Investasi eks PPA sejak tahun pelaporan 2022 berasal dari implementasi PSAP 17 Properti Investasi.

Rincian Properti Investasi eks PPA per klasifikasi aset adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Posisi 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31 Desember 2023
Tanah	388.427.787.000	-	-	388.427.787.000
Gedung dan Bangunan	210.321.124.057	8.420.890.664	(10.301.984.038)	208.440.030.683
Peralatan dan Mesin	11.679.963.584	5.144.383.215	-	16.824.346.799
Properti Investasi dalam Pengerjaan	204.825.011	2.482.770.468	(1.618.094.480)	1.069.500.999
Total Properti Investasi	**610.633.699.652**	**16.048.044.347**	**(11.920.078.518)**	**614.761.665.481**

Mutasi Properti Investasi eks PPA pada tahun 2023 dirinci sebagai berikut:

a. Mutasi tambah dapat dirinci sebagai berikut:

- Pengeluaran dana untuk upgrade aset tanah dan bangunan sebesar Rp7.804.049.835 dan peralatan dan mesin sebesar Rp5.144.383.215.
- Kapitalisasi retensi gedung dan bangunan sebesar Rp 385.717.568.
- Kapitalisasi denda gedung dan bangunan sebesar Rp231.123.261.
- Koreksi kurang saji KDP tahun 2022 sebesar Rp2.482.770.468.

b. Mutasi kurang dapat dirinci sebagai berikut

- Koreksi kurang saji KDP tahun 2022 gedung dan bangunan sebesar Rp2.497.511.950.
- Koreksi kelebihan selisih lebih dari penilaian wajar gedung dan bangunan sebesar Rp7.804.472.088.
- Pendetilan KDP sebesar Rp1.618.094.480.

3. Properti Investasi eks Pertamina

Penyajian pos Properti Investasi eks Pertamina sejak tahun pelaporan 2022 berasal dari implementasi PSAP 17 Properti Investasi. Posisi Properti Investasi eks Pertamina pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp28.027.050.534.100 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp18.890.126.863.729 sehingga nilai bersih setelah penyusutan adalah sebesar Rp9.136.923.670.371.

RIncian Properti Investasi eks Pertamina per kelompok adalah sebagai berikut:

Kelompok	Posisi 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31 Desember 2023
Kawasan	26.777.396.575.777	384.738.881	(5.100.535.919)	26.773.241.603.739
Non-Kawasan	1.248.905.473.650	5.464.281.711	-	1.248.941.786.191
Total Properti Investasi	**28.026.302.049.427**	**5.849.020.592**	**(5.100.535.919)**	**28.027.050.534.100**

Mutasi kurang bersih Properti Investasi eks Pertamina pada tahun yang berakhir di 31 Desember 2023 terdiri dari:

a. Mutasi tambah dapat dirinci sebagai berikut:
   - Koreksi pengeluaran dana untuk upgrade aset Kawasan sebesar Rp285.400.881 dan non Kawasan sebesar Rp36.312.540.
   - Reklasifikasi sebagian aset tendean ke properti investasi sebesar Rp5.427.969.171.
   - Pengakuan aset berlebih aset Kawasan sebesar Rp99.338.000.

b. Mutasi kurang dapat dirinci sebagai berikut:
   - Penghapusaan asset Kawasan sebesar Rp4.539.710.919.
   - Reklasifikasi ke asset lain-lain sebesar Rp560.825.000.

Pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 terdapat pemindahtanganan melalui lelang atas properti investasi dan aset lain-lain eks Pertamina berupa:

a. 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) unit peralatan, mesin, dan kendaraan bermotor serta 1 (satu) paket bongkaran gedung. Pemindahtanganan tersebut dituangkan dalam Risalah Lelang nomor 11/02/2023 tanggal 01 Februari 2023 dengan hasil lelang sebesar Rp101.099.999.

b. Scrap kapal bermotor dan 3 (tiga) unit tug boat. Pemindahtanganan tersebut dituangkan dalam Risalah Lelang nomor 57/02/2023 tanggal 05 April 2023 dengan hasil lelang sebesar Rp3.803.888.999.

Aset yang dipindahtangankan kemudian ditindaklanjuti dengan penghentian pengakuan pada neraca dengan rincian sebagai berikut (Sesuai KEP-69/LMAN/2023 dan KEP-69/LMAN/2023):

a. Penghentian pengakuan aset objek penghapusan yang tersaji pada pos properti investasi sebesar Rp4.539.710.919.

b. Penghentian pengakuan aset objek penghapusan yang tersaji pada pos aset lainnya Rp2.717.687.843.

4. Properti Investasi eks HTBI

Penyajian pos Properti Investasi eks HTBI sejak tahun pelaporan 2022 berasal dari implementasi PSAP 17 Properti Investasi. Posisi Properti Investasi eks HTBI pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp751.516.108.628 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp20.899.716.138 sehingga nilai bersih setelah penyusutan adalah sebesar Rp730.616.392.490.

Rincian Properti Investasi eks HTBI per klasifikasi aset adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Posisi 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31 Desember 2023
Tanah	633.448.122.140	-	(15.894.311.000)	617.553.811.140
Gedung dan Bangunan	123.214.967.357	10.025.423.204	(2.744.184.250)	130.496.206.311

Klasifikasi	Posisi 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31 Desember 2023
Peralatan dan Mesin	1.161.337.271	1.582.878.896	-	2.744.216.167
Properti Investasi dalam Pengerjaan	4.744.682.954	-	(4.022.807.944)	721.875.010
Total Properti Investasi	**762.569.109.722**	**11.608.302.100**	**(22.661.303.194)**	**751.516.108.628**

Mutasi Properti Investasi eks HTBI pada tahun 2023 dirinci sebagai berikut:

a. Mutasi tambah dapat dirinci sebagai berikut:

- Koreksi pengeluaran dana untuk upgrade aset Gedung dan bangunan sebesar Rp9.655.427.650 dan peralatan dan mesin sebesar Rp1.582.878.896.
- Kapitalisasi retensi gedung dan bangunan sebesar Rp273.225.265.
- Kapitalisasi denda gedung dan bangunan sebesar Rp96.770.289.

b. Mutasi kurang dapat dirinci sebagai berikut:

- Penarikan asset berupa tanah sebesar Rp15.894.311.000.
- Reklasifikasi ke asset lain-lain atas Gedung dan bangunan sebesar Rp23.381.250.
- Penarikan asset berupa Gedung dan bangunan sebesar Rp2.720.803.000.
- Pendetilan KDP sebesar Rp4.022.807.944.

5. Properti Investasi Lainnya

Posisi Properti Investasi Lainnya pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp213.936.785.550 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp4.617.408.814 sehingga nilai bersih setelah penyusutan adalah sebesar Rp209.319.376.736.

Rincian Properti Investasi Lainnya per klasifikasi aset adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Posisi 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31 Desember 2023
Gedung dan Bangunan	-	198.938.852.000	-	198.938.852.000
Peralatan dan Mesin	-	14.997.933.550	-	14.997.933.550
Total	**-**	**213.936.785.550**	**-**	**213.936.785.550**

Penambahan properti investasi lainnya pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 berasal dari penyerahkelolaan aset Gedung AA Maramis (termasuk peralatan dan mesin yang terdapat di dalamnya) dan penilaian wajar bangunan gedung AA Maramis dimaksud.

D.2.1.4.1.2. PROPERTI INVESTASI PADA BA 999.99

Saldo Properti Investasi tahun 2023 sebesar Rp57.855.246.424.044, sedangkan tahun 2022

sebesar Rp55.205.201.266.787, mengalami kenaikan sebesar Rp2.650.045.157.257.

Rincian Properti Investasi dari per 31 Desember 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Satker	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Bersih
1	UAKPA BMN Eks BMN Idle	92.242.781.101	139.617.044	92.103.164.057
2	UAKPA Aset Eks Pertamina	18.644.290.105.918	7.615.680.476.297	11.028.609.629.621
3	UAKPA Aset PKP2B	39.113.646.034.627	29.207.137.496.387	9.906.508.538.240
4	UAKPA BMN Hulu Migas pada DJKN	5.067.502.398	-	5.067.502.398
	Total	**57.855.246.424.044**	**36.822.957.589.728**	**21.032.288.834.316**

D.2.1.4.1.2.1. Properti Investasi pada UAKPA BMN Eks BMN Idle

Properti Investasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp92.242.781.101 dan Rp63.197.927.101. Rincian Properti Investasi UAKPA BMN Eks BMN Idle adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	31 Desember 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2023
Tanah	63.025.491.626	29.848.222.000	803.368.000	92.070.345.626
Bangunan	172.435.475	-	-	172.435.475
Total Properti Investasi	**63.197.927.101**	**29.848.222.000**	**803.368.000**	**92.242.781.101**

Mutasi Properti Investasi BMN Eks BMN Idle Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Mutasi tambah dengan rincian sebagai berikut:

Kode BMN Idle	Uraian Barang	Jumlah Barang	Nilai Perolehan
2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	6	5.091.740.000
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	3	1.348.055.000
2010101004	Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan	2	2.131.569.000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	22	18.991.914.000
2010104018	Tanah Bangunan Pos Jaga	1	251.125.000
2010104018	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	7	1.691.491.000
2010202003	Tanah Lapangan Parkir Sirtu (Pasir Batu)	1	160.473.000
2010307999	Tanah Untuk Jalan Lainnya	2	181.855.000
Grand Total		***44***	***29.848.222.000***

   Sesuai dengan Deklarasi PI atas reklasifikasi Aset Idle yang diserahkan ke DJKN ke Properti Investasi sesuai dengan Deklarasi PI Periode TA 2023.

2. Mutasi kurang berasal dari reklasifikasi PI ke Aset Idle yang diserahkan ke DJKN, karena terdapat penetapan status penggunaan satu bidang Tanah Bangunan Rumah Negara dalam

Proses Penggolongan dengan nilai perolehan sebesar Rp803.368.000,00 dari Kementerian Keuangan RI c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto kepada Mahkamah Agung c.q. Pengadilan Agama Kebumen.

D.2.1.4.1.2.2. Properti Investasi pada UAKPA Eks Pertamina

Properti Investasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp18.644.290.105.918 dan Rp15.895.457.535.288.

Pada periode pelaporan Tahun Anggaran 2022 lalu telah dilakukan reklasifikasi atas Aset Lainnya ke dalam Properti Investasi dengan pertimbangan aset eks Pertamina saat ini telah dilaksanakan pemanfaatan secara sewa oleh Pertamina EP atas sebagian aset eks pertamina dan telah ada perjanjian sewa antara kedua belah pihak, sehingga memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Demikian juga dengan aset yang tidak masuk dalam perjanjian sewa tersebut, memiliki potensi untuk dilakukan pemanfaatan di masa yang akan datang sehingga memenuhi kriteria juga sebagai properti investasi.

Rincian Properti Investasi UAKPA Eks Pertamina adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	31 Desember 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2023
Tanah & Bangunan	47.580.000.000	-	-	47.580.000.000
Aset Eks Kontrak Kerjasama	15.847.877.535.288	2.749.743.825.000	911.254.370	18.596.710.105.918
Total Properti Investasi	**15.895.457.535.288**	**2.749.743.825.000**	**911.254.370**	**18.644.290.105.918**

Peningkatan signifikan akun properti investasi disebabkan oleh adanya Inventarisasi dan Penilaian terhadap aset Eks Pertamina selama tahun 2023 sebesar Rp2.749.743.825.000.

D.2.1.4.1.2.2.1. Aset Berupa Tanah dan Bangunan

No	Lokasi Aset	Tanah (m^2)	Bangunan (m^2)	Nilai (Rp)
1	Sawangan, Depok	8.345	-	-
2	Jl. Abdul Muis 68, Jakarta	4.000	-	47.580.000.000
	Jumlah			**47.580.000.000**

Aset tanah di Jl. Abdul Muis Jakarta dan Sawangan Depok, Direktorat PKN telah mengirimkan surat kepada SVP Asset Management PT Pertamina (Persero) Nomor S-369/KN.4/2022 tanggal 23 Agustus 2022 hal Penyelesaian Tindak Lanjut Pengelolaan atas Aset Eks Pertamina di Jalan Abdul Muis dan Sawangan, Depok. Selain itu Tanah di Sawangan Depok masih dalam proses identifikasi lahan oleh PT Pertamina (Persero).

Terhadap Aset eks Pertamina di Jalan Abdul Muis, terdapat surat usulan sewa dari Commercial&Operation Director Pertamina Retail. Selanjutnya atas usulan tersebut Dit PKN telah mengirimkan surat Nomor S-1553/KN.4/2023 tanggal 29 September 2023 yang intinya memintakan kelengkapan dokumen atas usulan pemanfaatan yang diusulkan. Sampai dengan saat ini belum ada tanggapan dari PT Pertamina.

D.2.1.4.1.2.2.2. Aset Eks Kontrak Kerjasama Pertamina

Properti Investasi Aset Eks Kontrak Kerjasama per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp18.596.710.105.918 dan Rp15.895.457.535.288, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Aset	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Tanah	10.284.008.943.050	7.613.552.891.050
2	Bangunan	1.245.387.526.797	1 213 789 062 797
3	Equipment	3.846.777.393.764	3.811.280.514.133
4	Sumur	3.084.964.929.153	3.074.138.194.153
5	Lain-lain	135.571.313.154	135.116.873.154
	Jumlah	**18.596.710.105.918**	**15.847.877.535.288**

Aset eks Kontrak Kerjasama berada pada wilayah kerja di 12 Kanwil DJKN, rincian Properti Investasi Aset Eks Kontrak Kerjasama sebagai berikut:

No	Kanwil DJKN	31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Des 2023
1	Aceh	474.123.116.000	11.387.679.000	-	485.510.795.000
2	Sumatera Utara	442.661.579.040	23.967.045.000	-	466.628.624.040
3	Riau, Kepri dan Sumbar	1.211.399.974.499	1.981.025.000	-	1.213.380.999.499
4	Sumatera Selatan dan Babel	4.815.965.056.065	2.695.196.889.000	-	7.511.161.945.065
5	Serang	16.903.044.000	-	-	16.903.044.000
6	Jakarta	2.369.256.486	-	-	2.369.256.486
7	Jawa Barat	5.495.615.347.615	17.108.020.000	911.254.370	5.511.812.113.245
8	Jawa Tengah dan DIY	396.640.557.166	-	-	396.640.557.166
9	Jawa Timur	44.987.096.409	103.167.000	-	45.090.263.409
10	Kalimantan Selatan dan Tengah	876.316.852.300	-	-	876.316.852.300
11	Kaltimtara	1.478.753.638.330	-	-	1.478.753.638.330
12	Papua, Papua Barat, Maluku	592.142.017.378	-	-	592.142.017.378
	TOTAL	**15.847.877.535.288**	**2.749.743.825.000**	**911.254.370**	**18.596.710.105.918**

Adapun transaksi yang mempengaruhi aset eks kontrak kerjasama sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut:

1. Penghapusan aset berdasarkan KMK 6/KM.6/KN.3/2022 berupa 1 unit Gudang Jl Ambon dan KMK 11/MK.6/KN.4/2023 berupa 12 unit aset dimana sebanyak 8 unit yang sudah di-IP, sedangkan 4 unit belum di-IP (dengan nomor aset 107600, 107599, 106828, dan 107832). Adapun aset tersebut dilakukan penjualan berdasarkan Risalah Lelang Nomor 335/35/2022 tanggal 08 Juli 2022, namun BAST baru diterima pada Tahun 2023 dengan total nilai Rp911.254.370.

2. Hasil Inventarisasi dan Penilaian aset Eks Pertamina pada tahun 2023:

Nomor BA	Field	KPKNL	Jumlah	Nilai IP
BA-01	Pendopo dan Adera	Lahat	7	2.663.178.925.000
BA-02	Pendopo	Lahat	12	7.277.127.000
BA-03	Jambi	Jambi	9	408.588.000
BA-04	Lirik	Pekanbaru	99	48.000
BA-05	Lirik	Pekanbaru	115	913.508.000
BA-06	Lirik	Pekanbaru	186	1.067.469.000
BA-07	Rantau	Lhokseumawe	100	4.992.271.000
BA-08	Rantau	Lhokseumawe	86	6.395.408.000
BA-09	Pangkalan Susu	Medan	125	11.763.079.000
BA-10	Pangkalan Susu	Medan	109	6.343.110.000
BA-11	Rantau	Medan	40	5.860.856.000
BA-12	Prabumulih	Palembang	228	14.196.677.000
BA-13	Limau	Lahat	121	1.285.549.000
BA-14	Pendopo	Lahat	146	8.850.023.000
BA-15	Jatibarang	Cirebon	115	7.156.152.000
BA-16	Jatibarang	Cirebon	138	4.771.576.000
BA-17	Jatibarang	Cirebon	54	3.876.303.000
BA-18	Jatibarang	Cirebon	43	1.303.989.000
BA-19	Cepu	Surabaya dan Madiun	7	103.167.000
Jumlah			**1.740**	**2.749.743.825.000**

Sebagian Properti Investasi berupa Aset Eks Kontrak Kerjasama telah dilaksanakan pemanfaatan secara sewa oleh Pertamina EP sesuai perjanjian sewa antara Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Direktur Utama PT Pertamina EP Nomor PRJ-1/MK.6/2022 Nomor 001/PEP00000/2022-S0 tanggal 27 Desember 2022. Dengan adanya kesepakatan perjanjian sewa tersebut dimana menggunakan angka dasar sewa sebesar Rp6.630.929.353.338 dengan jangka waktu perjanjian sewa selama 32 (tiga puluh dua) tahun terhitung sejak tanggal 17 September 2003 dan berakhir tanggal 16 September 2035. Tarif sewa untuk penggunaan BMN Eks Aset Pertamina adalah sebesar Rp6.630.929.353.338: 384 bulan = Rp17.268.045.191 per bulan atau Rp207.216.542.292 per tahun.

D.2.1.4.1.2.3. Properti Investasi pada UAKPA PKP2B

Properti Investasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp39.113.646.034.627 dan Rp39.246.545.804.398. Rincian Properti Investasi UAKPA PKP2B adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Saldo 31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Des 2023
Tanah	3.461.755.460.870	18.810.471.760	(146.142.030.000)	3.334.423.902.630
Non Tanah	35.784.790.343.528	81.472.026.855	(87.040.238.386)	35.779.222.131.997
Total Properti Investasi	**39.246.545.804.398**	**100.282498.615**	**(233.182.268.386)**	**39.113.646.034.627**

Mutasi Properti Investasi BMN BMN PKP2B Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Mutasi tambah Properti Investasi yaitu sebesar Rp100.282.498.615 dengan rincian sebagai berikut:
    a. Mutasi Tambah Tanah sebesar Rp18.810.471.760 terdiri atas:
        1) Penambahan Tanah PT KPC sebesar Rp3.483.000.000 merupakan tanah perolehan diatas tahun 2010 yang baru dilaporkan oleh PT KPC berupa 6 SPPT yang berkaitan dengan kegiatan Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) jalur Sangatta – Maloy sesuai tanda terima pembayaran ganti rugi;
        2) Penambahan Tanah PT KPC Sebesar Rp5.223.829.760 merupakan tanah perolehan diatas tahun 2010 yang baru dilaporkan oleh PT KPC berupa 13 SPPT pada koridor Jalan Pengalih Permanen ruas Sangata – Simpang Perdau (SPRD) sesuai Berita Acara Penelitian Administrasi dan Verifikasi Dokumen Pendukung BMN berupa Tanah PT KPC Nomor 115/SDB.K/IX/2023 tanggal 20 September 2023;
        3) Penambahan BMN Tanah PT KPC sebesar Rp7.021.260.000 sesuai hasil Inventarisasi dan Penilaian sesuai Laporan Penilaian Nomor Lap-0125/1/PRO-01/KNL.1304/01.01.00/2023 tanggal 14 September 2023 berupa 19 SPPT pada koridor Jalan Pengganti Permanen ruas Simpang Perdau – Batu Ampar (MWRD);
        4) Penambahan BMN Tanah PT KPC sebesar Rp3.082.382.000 sesuai Laporan Penilaian Nomor Lap-0148-0151/1/PRO-01/KNL.1304/01.01.00/2023 tanggal 18 Desember 2023 berupa 15 bidang tanah yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan SUTT jalur Sangatta – Maloy.
    b. Mutasi Tambah Non Tanah sebesar Rp81.472.026.855 terdiri atas:
        1) Penambahan BMN non Tanah sebesar Rp33.344.754.855 merupakan penyelesaian pekerjaan yang dimulai pada masa PKP2B dan diselesaikan pada masa IUPK TA 2023 PT KPC. Hal ini sesuai dengan ketentuan peralihan PMK 225/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan BMN Yang Berasal Dari PKP2B;
        2) Penambahan BMN Non Tanah PT KPC (Kode Aset G112 dan 5.250) sebesar Rp23.466.970.000 sesuai Laporan Penilaian nomor Lap-0124/1/PRO-01/KNL.1304/01.01.00/2023 tanggal 14 September 2023 sebagai tindak lanjut dari KMK 573/2020 yaitu BMN dalam kondisi Rusak Berat namun hasil sensusnya menunjukan kondisi baik dan masih digunakan;
        3) Penambahan BMN Tanah PT Kideco Jaya Agung sebesar Rp6.774.285.000 sesuai Laporan Penilaian Nomor LAP-0331/1/PRO-1/KNL.0702/01.01.00/2023 tanggal 2 Oktober 2023, LAP-0106/1/PRO-01/KNL.1301/01.01.00/2023 tanggal 6 November 2023, dan LAP-0107/1/PRO-01/KNL.1301/01.01.00/2023 tanggal 6 November 2023;
        4) Penambahan BMN Non Tanah PT Arutmin Indonesia sebesar Rp17.886.017.000 sesuai hasil Laporan Penilaian Nomor LAP-0221/1/PRO-01/KNL.0702/01.01.00/2023 tanggal 28 Juli 2023 dan Lap-0270/1/PRO-01/KNL.1304/01.01.00/2023 s.d 0276/1/PRO-01/KNL.1304/01.01.00/2023 tanggal 10 Agustus 2023.
2. Mutasi kurang Properti Investasi yaitu sebesar Rp233.182.268.385 karena:
    a. Mutasi kurang tanah sebesar Rp146.142.030.000 yaitu SK Penghapusan dengan Nomor 383.K/BN.09/SJN.A/2023 tanggal 17 April 2023 tentang Penghapusan BMN Berupa

Tanah Yang Berasal dari PKP2B PT Multi Harapan Utama Di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur Yang Telah Dilakukan PSP Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dilakukan penghapusan pada Neraca sebesar Rp146.142.030.000;

b. Mutasi kurang non tanah sebesar Rp87.040.238.386 terdiri atas:

1) Penghapusan sesuai SK Menteri ESDM Nomor 385.K/BN.09/SJN.A/2023 tanggal 17 April 2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara yang Berasal dari PKP2B PT Kideco Jaya Agung di Jakarta yang Telah Ditetapkan Status Penggunaannya kepada KESDM c.q. Satker Ditjen Mineral dan Batubara dengan nilai sebesar Rp3.410.437.801;

2) Penghapusan Pemusnahan sesuai SK Menteri ESDM Nomor 466.K/BN.09/SJN.A/2022 tanggal 15 Mei 2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara yang Berasal dari PKP2B PT Kideco Jaya Agung di Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai sebesar Rp8.183.378.000;

3) Penghapusan sebab-sebab lain sesuai SK Menteri ESDM Nomor 61.K/BN.09/SJN.A/2023 tanggal 26 Januari 2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Kideco Jaya Agung di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai sebesar Rp11.892.480.000;

4) Penghapusan Pemusnahan sesuai SK Menteri ESDM Nomor 758.K/BN.09/SJN.A/2022 tanggal 22 Agustus 2023 Tentang Penghapusan BMN yang Berasal dari PKP2B PT Kideco Jaya Agung di Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai sebesar Rp7.981.329.000;

5) Penghapusan sebab-sebab lain sesuai SK Menteri ESDM Nomor 819.K/BN.09/SJN.A/2023 tanggal 12 September 2023 Tentang Penghapusan BMN yang Berasal dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Arutmin Indonesia di Tambang Asam-Asam, Satui, dan Senakin Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai sebesar Rp21.258.732.897.

6) Penghapusan sebab-sebab lain sesuai SK Menteri ESDM Nomor 946.K/BN.09/SJN.A/2023 tanggal 23 Oktober 2023 Tentang Penghapusan BMN yang berasal dari PKP2B PT Kideco Jaya Agung di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai sebesar Rp6.110.274.000;

7) Penghapusan karena penjualan sesuai SK Menteri ESDM Nomor 1057.K/BN.09/SJN.A/2023 tanggal 5 Desember 2023 Tentang Penghapusan BMN berupa Peralatan dan Mesin yang berasal dari PKP2B PT Multi Harapan Utama di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai sebesar Rp65.265.000;

8) Penghapusan sebab-sebab lain sesuai SK Menteri ESDM Nomor 1097.K/BN.09/SJN.A/2023 tanggal 14 Desember 2023 Tentang Penghapusan BMN yang Berasal dari PKP2B PT Arutmin Indonesia di Tambang Satui dan Batulicin Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai sebesar Rp28.138.341.687.

3. Saldo akhir 31 Desember 2023 Properti Investasi yaitu sebesar Rp39.113.646.034.627.

D.2.1.4.1.2.4. Properti Investasi pada UAKPA BMN Hulu Migas pada DJKN

Properti Investasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.067.502.398 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp5.067.502.398 dan Rp0. Seluruh Properti Investasi UAKPA PL BMN Hulu Migas pada DJKN adalah berupa tanah sebagaimana tabel berikut berikut:

Klasifikasi	31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Des 2023
Tanah	-	5.067.502.398	-	5.067.502.398
Total Properti Investasi	**-**	**5.067.502.398**	**-**	**5.067.502.398**

Mutasi tambah merupakan reklasifikasi aset lainnya di tahun 2023 yang terdiri atas:

No	KKKS Asal	Nilai
1	Star Energy (Sekayu) Ltd.	479.504.520
2	Orchard Energy (West Belida Limited)	77.760.000
3	Aset eks Pan Orient Energy (Citarum) Pte. Ltd.	4.510.237.878
Total		**5.067.502.398**

Properti Investasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.067.502.398 yang merupakan reklasifikasi dari Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Aset eks Star Energy Sekayu berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Sekayu (Kementerian ESDM kepada Kementerian Keuangan) Nomor 0023.BA/92/SJA.4/2019 dan Nomor BA-4/KN.4/2019 tanggal 17 Mei 2019.

No	Lokasi	Tanggal Perolehan	Tanggal Penilaian	Luas (m2)	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Wajar (Rp)
1	Danau Cala, Lais, Musi Banyuasin, Sumsel	07 September 2013	-	25.643	479.504.520	-

2. Aset eks Orchard Energy (West Belida Limited) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja West Belida (Kementerian ESDM kepada Kementerian Keuangan) Nomor 0024.BA/92/SJA.4/2019 dan Nomor BA-5/KN.4/2019 tanggal 17 Mei 2019.

No	Lokasi	Tanggal Perolehan	Tanggal Penilaian	Luas (m2)	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Wajar (Rp)
1	Sungai Merah, Pelawan, Sarolangun, Jambi	7 Agustus 2012	12 November 2021	8.099,78	809.978.000	26.497.000
2	Pelawan Jaya, Pelawan, Sarolangun, Jambi	7 Agustus 2012	12 November 2021	12.888,29	1.501.329.000	51.263.000

3. Aset eks Pan Orient Energy (Citarum) Pte. Ltd berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja

Citarum (Kementerian ESDM kepada Kementerian Keuangan) Nomor 16.BA/92/SJA.4/2020 dan Nomor BA-1/KN.4/2020 tanggal 29 Juli 2020 untuk aset di lokasi Kabupaten Karawang.

No	Lokasi	Tanggal Perolehan	Tanggal Penilaian	Luas (m2)	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Wajar (Rp)
1	Kec. Pangkalan, Kab. Kawarang, Jawa Barat	2011	-	54.196	4.510.237.878	-

D.2.1.4.2. AKUMULASI PENYUSUTAN PROPERTI INVESTASI

D.2.1.4.2.1. AKUMULASI PENYUSUTAN PROPERTI INVESTASI PADA BA 999.03

Nilai akumulasi penyusutan properti investasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp18.970.707.762.443 dan Rp18.180.688.477.231, terdapat peningkatan sebesar Rp790.019.285.212 atau 4,35% dari saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022.

Kelompok Aset Penyerahkelolaan	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan
Properti Investasi eks BPPN	405.466.565	94.388.927	311.077.638
Properti Investasi eks PPA	54.658.307.197	45.603.711.066	9.054.596.131
Properti Investasi eks Pertamina	18.890.126.863.729	18.116.764.260.245	773.362.603.484
Properti Investasi eks HTBI	20.899.716.138	18.226.116.993	2.673.599.145
Properti Investasi Lainnya	4.617.408.814	-	4.617.408.814
Total Properti Investasi	**18.970.707.762.443**	**18.180.688.477.231**	**790.019.285.212**

1. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi eks BPPN

Nilai akumulasi penyusutan properti investasi eks BPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp405.466.565 dan Rp94.388.927 dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan	Posisi 31-Des-2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31-Des-2023
Gedung dan Bangunan	94.388.927	311.301.709	(224.071)	405.466.565
	94.388.927	**311.301.709**	**(224.071)**	**405.466.565**

2. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi eks PPA

Nilai akumulasi penyusutan properti investasi eks PPA per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp54.658.307.197 dan Rp45.603.711.066 dengan rincian sebagai berikut:

Penyusutan	31-Des-2022	Tambah	Kurang	31-Des-2023
Gedung dan Bangunan	38.058.654.868	6.446.793.001	-	44.505.447.869
Peralatan dan Mesin	7.545.056.198	2.801.120.855	(193.317.725)	10.152.859.328
	45.603.711.066	**9.247.913.856**	**(193.317.725)**	**54.658.307.197**

3. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi eks Pertamina

Nilai akumulasi penyusutan properti investasi eks Pertamina per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp18.890.126.863.729 dan Rp18.116.764.260.245 dengan rincian sebagai berikut.

Akumulasi Penyusutan	Posisi 31-Des-2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31-Des-2023
Kawasan	18.115.684.810.492	777.884.430.261	(4.966.713.962)	18.888.602.526.791
Non-Kawasan	1.079.449.753	444.887.185	-	1.524.336.938
	18.116.764.260.245	**778.329.317.446**	**(4.966.713.962)**	**18.890.126.863.729**

4. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi eks HTBI

Nilai akumulasi penyusutan properti investasi eks HTBI per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp20.899.716.138 dan Rp18.226.116.993 dengan rincian sebagai berikut.

Akumulasi Penyusutan	Posisi 31-Des-2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31-Des-2023
Gedung dan Bangunan	17.876.637.860	4.233.550.408	(2.039.984.135)	20.070.204.133
Peralatan dan Mesin	349.479.133	480.032.872	-	829.512.005
	18.226.116.993	**4.713.583.280**	**(2.039.984.135)**	**20.899.716.138**

5. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Lainnya

Nilai akumulasi penyusutan properti investasi lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.617.408.814 dan Rp0. Penambahan properti investasi lainnya pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 berasal dari penyerahkelolaan aset Gedung AA Maramis (termasuk peralatan dan mesin yang terdapat di dalamnya) dan penilaian wajar bangunan gedung AA Maramis dimaksud.

Akumulasi Penyusutan	Posisi 31-Des-2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31-Des-2023
Gedung dan Bangunan	-	1.989.388.520	-	1.989.388.520
Peralatan dan Mesin	-	2.628.020.294	-	2.628.020.294
	-	**4.617.408.814**	**-**	**4.617.408.814**

D.2.1.4.2.2. AKUMULASI PENYUSUTAN PROPERTI INVESTASI PADA BA 99.999

Nilai akumulasi penyusutan properti investasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp36.822.957.589.728 dan Rp35.960.858.377.772, terdapat peningkatan sebesar Rp862.099.211.956 atau 2,40% dari saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022.

D.2.1.4.2.2.1. Akumulasi Properti Investasi pada UAKPA BMN Eks BMN Idle

No	Akun Neraca	Nilai (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	62.222.123.626	-	62.222.123.626
2	Gedung dan Bangunan	172.435.475	139.617.044	32.818.431
	Total	**91.733.914.101**	**139.617.044**	**91.594.297.057**

D.2.1.4.2.2.2. Akumulasi Properti Investasi pada UAKPA Eks Pertamina

Saldo akumulasi properti investasi pada UAKPA Eks Pertamina pada tahun 2023 sebesar Rp7.615.680.476.297 yang berasal dari penyusutan Properti Investasi dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi penyusutan 2022 di Neraca	**7.227.368.751.795**
Mengakui penyusutan selama semester I tahun 2023	353.170.251.672
Menghapus Akumulasi penyusutan untuk aset di Cirebon yang dihapuskan berdasarkan KMK 6/KM.6/KN.3/2022 dan KMK 11/MK.6/KN.4/2023	(783.322.188)
Mengakui penyusutan selama semester II tahun 2023	35.924.795.018
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023 di Neraca	**7.615.680.476.297**

D.2.1.4.2.2.3. Akumulasi Properti Investasi pada UAKPA PKP2B

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp28.967.768.500.446 dan Rp28.733.350.946.603. Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebagai berikut:

Saldo Awal 1 Januari 2023	**28.733.350.946.603**
Mutasi Tambah:	**550.539.235.715**
Penyusutan	546.446.562.015
Koreksi Akm Penyusutan	4.092.673.700
Mutasi Kurang:	**(76.752.685.931)**
Penghapusan	(76.752.685.931)
Saldo Akhir 31 Desember 2023	**29.207.137.496.387**

Penjelasan atas nilai akumulasi penyusutan properti investasi yang disajikan dalam Neraca adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal merupakan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi pada 31 Desember 2022 sebesar Rp28.733.350.946.603.
2. Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebesar Rp550.539.235.715 merupakan penyusutan Properti Investasi rincian sebagai berikut.
   a. Penyusutan Properti Investasi sebesar Rp546.446.562.015 dengan rincian sebagai berikut.
      - PT Adaro Indonesia sebesar Rp73.466.597.941;
      - PT Tanito Harum sebesar Rp277.187.438;
      - PT Multi Harapan Utama sebesar Rp2.781.337.950;

- PT Kideco Jaya Agung sebesar Rp100.155.011.966;
- PT Arutmin Indonesia sebesar Rp100.646.368.170;
- PT Kaltim Prima Coal sebesar Rp269.078.866.276;
- PT Kendilo Coal Indonesia sebesar Rp41.192.274.

b. Koreksi Akumulasi penyusutan sebesar Rp4.092.673.700.

3. Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebesar Rp76.752.685.931 dengan rincian sebagai berikut.

a. SK Menteri ESDM Nomor 385.K/BN.09/SJN.A/2023 tanggal 17 April 2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara yang Berasal dari PKP2B PT Kideco Jaya Agung di Jakarta yang Telah Ditetapkan Status Penggunaannya kepada KESDM c.q. Satker Ditjen Mineral dan Batubara dengan nilai sebesar Rp3.410.437.800.

b. Pemusnahan sesuai SK Menteri ESDM Nomor 466.K/BN.09/SJN.A/2022 tanggal 15 Mei 2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara yang Berasal dari PKP2B PT Kideco Jaya Agung di Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai sebesar Rp6.375.753.483.

c. Penghapusan sebab-sebab lain sesuai SK Menteri ESDM Nomor 61.K/BN.09/SJN.A/2023 tanggal 26 Januari 2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Kideco Jaya Agung di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai sebesar Rp7.853.807.348.

d. Penghapusan Pemusnahan sesuai SK Menteri ESDM Nomor 758.K/BN.09/SJN.A/2022 tanggal 22 Agustus 2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara yang Berasal dari PKP2B PT Kideco Jaya Agung di Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai sebesar Rp7.981.329.000.

e. Penghapusan sebab-sebab lain sesuai SK Menteri ESDM Nomor 819.K/BN.09/SJN.A/2023 tanggal 12 September 2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Arutmin Indonesia di Tambang Asam-Asam, Satui, dan Senakin Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai sebesar Rp18.059.469.719.

f. Penghapusan sebab-sebab lain sesuai SK Menteri ESDM Nomor 946.K/BN.09/SJN.A/2023 tanggal 23 Oktober 2023 Tentang Penghapusan BMN yang berasal dari PKP2B PT Kideco Jaya Agung di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai sebesar Rp6.110.274.000.

g. Penghapusan penjualan sesuai SK Menteri ESDM Nomor 1057.K/BN.09/SJN.A/2023 tanggal 5 Desember 2023 Tentang Penghapusan BMN berupa Peralatan dan Mesin yang berasal dari PKP2B PT Multi Harapan Utama di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai sebesar Rp65.265.000.

h. Penghapusan sebab-sebab lain sesuai SK Menteri ESDM Nomor 1097.K/BN.09/SJN.A/2023 tanggal 14 Desember 2023 Tentang Penghapusan BMN yang

Berasal dari PKP2B PT Arutmin Indonesia di Tambang Satui dan Batulicin Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai sebesar Rp26.896.349.580.

4. Saldo akhir 31 Desember 2023 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi yaitu sebesar Rp29.207.137.496.387 dengan rincian sebagai berikut.
   a. PT Adaro Indonesia sebesar Rp4.916.596.140.322.
   b. PT Tanito Harum sebesar Rp11.563.296.656.
   c. PT Multi Harapan Utama sebesar Rp65.818.966.285.
   d. PT Kideco Jaya Agung sebesar Rp3.811.320.288.057.
   e. PT Arutmin Indonesia sebesar Rp1.878.169.120.967.
   f. PT Kaltim Prima Coal sebesar Rp18.523.587.299.551.
   g. PT Kendilo Coal Indonesia sebesar Rp82.384.549.

D.2.1.5. PIUTANG JANGKA PANJANG

Jumlah Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp47.830.027.314.323 dan Rp52.136.458.878.032 atau mengalami penurunan sebesar Rp4.306.431.563.709 atau (8,26%).

Rincian Piutang Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	48.644.267.627.749	52.972.302.791.953
Piutang Jangka Panjang Lainnya	2.207.678.942.380	2.236.811.940.347
(Peny.Piutang Tak Tertagih Piutang Jangka Panjang)	(3.021.919.255.806)	(3.072.655.854.268)
Jumlah Piutang Jangka Panjang	**47.830.027.314.323**	**52.136.458.878.032**

D.2.1.5.1. PIUTANG JANGKA PANJANG PEMBERIAN PINJAMAN

Sampai dengan tanggal pelaporan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, jumlah Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman sebesar Rp48.644.267.627.749 dan Rp52.972.302.791.953, mengalami penurunan sebesar Rp4.328.035.164.204 atau (8,17%).

Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman pada BA 999.04 per 31 Desember 2023 sebesar Rp48.644.267.627.749, dengan Rincian adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman (153111)	48.048.014.311.995	52.369.302.315.728
Aset Lainnya Kredit Program (153117)	596.253.315.754	603.000.476.225
Jumlah	**48.644.267.627.749**	**52.972.302.791.953**

Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman adalah piutang pokok pemberian pinjaman yang belum tempo dalam jangka waktu 12 bulan, sedangkan aset lainnya kredit program terdiri dari Kredit Listrik Pedesaan, Perusahaan Inti Rakyat, Proyek Pemuliaan dan Pengembangan Sapi Bali, Proyek Pengembangan Pendidikan Akuntansi, Redistribusi Ternak, dan Unit Pelaksana Proyek Perkebunan.

D.2.1.5.2. PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

Jumlah Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.207.678.942.380 dan Rp2.236.811.940.347, mengalami penurunan sebesar Rp29.132.997.967 atau (1,30%). Piutang untuk Tahun 2023 terdiri dari BA 999.03 bagian Piutang Jangka Panjang lainnya bagian laba BUMN Perumnas sebesar Rp24.725.637.648 dan pada BA999.99 bagian Piutang Jangka Panjang lainnya sebesar Rp2.182.953.304.732, dengan rincian sebagai berikut :

1. Piutang Jangka Panjang lainnya pada BA 999.03 per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.725.637.648 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp32.225.637.648, yang merupakan Piutang dari Perum Perumnas.

   Piutang Jangka Panjang lainnya pada BA 999.03 sebesar Rp24.725.637.648 tersebut merupakan bagian dari piutang atas tunggakan Dana Pembangunan Semesta (DPS) Perum Perumnas dengan total tunggakan per 31 Desember 2023 sebesar Rp58.225.637.648.

   Sesuai dengan surat Menteri Keuangan nomor S-693/MK.02/2019 tanggal 23 September 2019 telah dilakukan restrukturisasi piutang Perum Perumnas tahun buku 1991-1997 sebesar Rp62.225.637.648 menjadi piutang jangka panjang. Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya pada BA 999.03 sebesar Rp24.725.637.648 berasal dari saldo restrukturisasi piutang Perum Perumnas tahun buku 1991-1997 sebesar Rp62.225.637.648 dikurangi dengan Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang Lainnya yang jatuh tempo pada akhir tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 masing-masing sebesar Rp7.500.000.000.

2. Piutang Jangka Panjang lainnya pada BA 999.99 per 31 Desember 2023 sebesar USD141,392,144 atau ekuivalen sebesar Rp2.182.953.304.732 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.204.586.302.699, yang seluruhnya merupakan piutang migas yang berasal dari PT TPPI. Dalam jumlah tersebut di dalamnya juga termasuk piutang yang berasal dari denda/penalti PT TPPI sebesar USD2,158,778 atau ekuivalen sebesar Rp33.329.367.366. Saldo piutang jangka panjang tahun 2023 setelah dikurangi dengan penyisihan piutang jangka panjang adalah sebesar Rp0, karena piutang ini digolongkan sebagai piutang macet dengan penyisihan sebesar 100%.

   Atas Piutang Jangka Panjang yang berasal dari PT TPPI, DJA telah meminta pendapat hukum Jamdatun yang telah disampaikan melalui Surat Jamdatun Nomor B-209/G/Gph.1/3/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang pada intinya menyatakan bahwa Piutang Jangka Panjang yang berasal dari PT TPPI dicatat berdasarkan hubungan keperdataan yang mengikat PT TPPI sebagai badan hukum dengan BP Migas (sekarang SKK Migas).

   Atas piutang dimaksud, TPPI telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui

Putusan Pengadilan Niaga No: 47/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. Nomor: 60/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst per tanggal 26 Desember 2012.

Namun demikian, mempertimbangkan Surat Jamdatun No. R-116/G/Gph. 1/01/2023, tanggal 31 Januari 2023 perihal Pendapat Hukum Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia PT TPPI oleh SKK Migas, yang pada intinya menyampaikan bahwa:

a. Meskipun terdapat Putusan Perdamaian/Homologasi terhadap TPPI sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat Nomor 47/PKPU/2012/PN.Niaga,Jkt,Pst, jo, Nomor 60/Pailit/2012/PN. Niaga, Jkt. Pst, namun berdasarkan ketentuan Pasal 286 jo. Pasal 281 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, SKK Migas tidak tunduk pada penyelesaian kewajiban pembayaran TPP/ yang diatur dalam Putusan Homologasi dimaksud.

b. Penyelesaian kewajiban pembayaran TPPI kepada SKK Migas terkait penjualan kondensat bagian negara mengacu pada Seller Appointed Agreement (SAA) beserta amandemennya yaitu dengan melakukan pencairan jaminan-jaminan fiducia yang termuat dalam Akta Fiducia sebagaimana diatur dalam Pasal 5.10 jo. Pasal 19.3 SAA.

Berdasarkan Sertifikat Jaminan Fiducia. No. W7-000819 AH.05.01.TH2011/STD dengan Salinan Buku Daftar Fiducia tanggal 10 Januari 2011 dan perubahannya tanggal 28 Juni 2011, bahwa nilai Jaminan Fidusia sebesar USD300.000.000 dengan nilai Obyek Jaminan Fidusia sebesar USD178.736.443,98.

Adapun obyek Jaminan Fidusia terdiri dari:

a. Kondensat Bagian Negara yang hak kepemilikannya telah beralih sepenuhnya kepada PT TPPI, baik yang telah ada pada saat Perjanjian Penunjukan Penjual maupun perubahannya, terakhir dengan Amandemen Kedua, ditandatangani maupun yang akan dimiliki PT TPPI di kemudian hari yang jumlahnya sebanyak 55.719 ton atau 488.122 barrel.

b. Barang setengah jadi (Sweet Naphta BTX, Intermediate Products) milik PT TPPI, baik yang telah ada pada saat Akta ditandatangani maupun yang dimiliki PT TPPI di kemudian hari dengan total sejumlah 20.727 ton atau 158.861 barrel.

c. Barang jadi milik PT TPPI, baik yang telah ada pada saat Akta ditandatangani maupun yang dimiliki PT TPPI di kemudian hari.

d. Accounts Receivable atau piutang yang merupakan hasil penjualan dari barang jadi milik PT TPPI baik yang telah ada pada saat Akta ditandatangani maupun yang dimiliki oleh PT TPPI di kemudian hari.

e. Klaim Asuransi atas kondensat dalam pengiriman dan inventory baik yang telah ada pada saat Akta ini ditandatangani maupun yang akan dimiliki PT TPPI di kemudian hari.

Saat ini, SKK Migas selaku pihak yang berikat kontrak dengan PT TPPI sedang mempertimbangkan untuk menempuh opsi eksekusi Jaminan Fidusia dan opsi lainnya dalam penyelesaian piutang PT TPPI, di antaranya:

a. Penyelesaian Pembayaran Penuh atas Total Outstanding (Pokok dan Denda);
b. Skema debt to equity swap;
c. Pelimpahan piutang kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
d. Pembayaran tunai melalui pemotongan (cicilan) revenue PT TPPI;
e. Tunduk pada putusan PKP.

D.2.1.5.3. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH PIUTANG JANGKA PANJANG

Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp3.021.919.255.806 dan Rp3.072.655.854.268, mengalami penurunan sebesar Rp50.736.598.462 atau (1,65%) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Pemberian Pinjaman	836.493.387.309	864.846.987.804
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	2.185.425.868.497	2.207.808.866.464
Total		**3.021.919.255.806**	**3.072.655.854.268**

1. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Pemberian Pinjaman

Sampai dengan 31 Desember 2023 jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Pemberian Pinjaman adalah sebesar Rp836.493.387.309. Jumlah ini berasal dari Penyisihan Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman (156511) sebesar Rp240.240.071.560, dan Penyisihan Tidak Tertagih – Aset Lainnya Kredit Program (156513) sebesar Rp596.253.315.749.

2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.185.425.868.497 dan Rp2.207.808.866.464.

Saldo penyisihan piutang jangka panjang sebesar Rp2.185.425.868.497 berasal dari saldo piutang jangka panjang BA 999.03 sebesar sebesar Rp24.725.637.648 disisihkan sebesar 10 (sepuluh) persen atau sejumlah Rp2.472.563.765, dan dari BA 999.99 sebesar Rp2.182.953.304.732 berasal dari saldo piutang jangka panjang PT TPPI yang digolongkan dalam piutang macet, yaitu dengan jumlah penyisihan sebesar 100 persen, sehingga penyisihan piutang jangka panjang Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.182.953.304.732.

D.2.1.6. ASET LAINNYA

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.185.499.685.178.993 dan Rp1.015.356.148.680.020 atau mengalami kenaikan sebesar Rp170.143.536.498.973 (16,76%).

Rincian Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Tak Berwujud	116.979.217.170	190.240.614.474
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	446.302.794.935.058	319.881.409.961.767
Dana Cadangan Penjaminan	12.216.159.505.000	11.885.648.000.000
Dana Kelolaan BLU	16.047.968.379.573	10.340.470.045.889
Dana Jangka Panjang	36.015.899.438.036	28.798.237.380.309
Aset Lain-lain	644.945.117.418.303	614.634.699.183.703
Aset Lainnya dr Ekuitas UBL	29.854.766.285.853	29.625.443.493.878
TOTAL	**1.185.499.685.178.993**	**1.015.356.148.680.020**

D.2.1.6.1. ASET TAK BERWUJUD

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp116.979.217.170 dan Rp190.240.614.474, terdapat penurunan Rp73.261.397.304 atau 38,51%. Aset tak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Perbandingan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada tabel berikut:

(*dalam rupiah*)

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2023	31 Desember 2022
112	BP Batam		
	Hasil Kajian/penelitian	11.413.946.166	7.705.413.966
	Aset Tak Berwujud Lainnya	2.735.096.589	2.191.574.089
-	Otoritas Jasa Keuangan		
	Software	0	31.915.327.104
	Lisensi	0	49.611.738.008
-	SKK Migas		
	Software	100.133.563.415	96.319.411.307
	Lisensi	2.280.897.000	2.279.740.000
	Aset Tak Berwujud Lainnya	415.714.000	217.410.000
Total		**116.979.217.170**	**190.240.614.474**

Mutasi Aset Tak Berwujud tersebut per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

(*dalam rupiah*)

Saldo Awal	**190.240.614.474**
Penambahan :	**8.265.667.808**
Pembelian	3.883.522.850
Perolehan Lainnya	2.947.450.249
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	1.737.499
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	290.387.000
Reklasifikasi Masuk	177.194.850
Koreksi Susulan	965.375.360
Pengurangan	**81.527.065.112**
Hibah Keluar	81.527.065.112
Saldo per 31 Desember 2023	**116.979.217.170**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	**(96.778.508.974)**
Nilai buku per 31 Desember 2023	**20.200.708.196**

D.2.1.6.2. DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Saldo Dana yang Dibatasi Pengunaannya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp446.302.794.935.058 dan Rp319.881.409.961.767, mengalami kenaikan sebesar Rp126.421.384.973.291 atau (39,52%). Angka untuk tahun 2023 ini didapat setelah dikurangi Dana Cadangan Penjaminan sebesar Rp12.216.159.505.000. Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
BA 999.00	148.155.907.631.641	52.253.149.048.677
BA 999.03	-	4.847.519.139.589
BA 999.07	-	20.000.000
BA 999.08	51.085.061.052.125	49.537.201.072.544
BA 999.99	259.362.135.477.663	229.976.687.840.546
Penyesuaian eliminasi dana yang dibatasi penggunaannya	(12.300.309.226.371)	(16.733.167.139.589)
TOTAL	**446.302.794.935.058**	**319.881.409.961.767**

D.2.1.6.2.1. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Akuntansi Pusat

Jumlah Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar **Rp148.155.907.631.641** dan **Rp52.253.149.048.677** mengalami kenaikan sebesar Rp95.902.758.582.964 atau 183,53 persen apabila dibandingkan dengan saldo tahun 2022. Kenaikan saldo dana yang dibatasi penggunaannya pada Tahun 2023 sebagian besar disebabkan karena adanya peningkatan dana pada rekening TDF sebesar Rp41,36 triliun dan pembentukan Rek Lain BI RPATA dengan saldo sebesar Rp21,1 triliun.

No	Nama Rekening	Saldo 31 Desember 2023	Saldo 31 Desember 2022
1	Dana di Rekening Investasi Pemerintah PEN (RIPPEN)	-	4.847.519.139.589
2	Dana di Rekening Treasury Deposit Facility-Transfer Keuangan Daerah	66.498.332.128.500	25.132.963.282.524
3	Dana Lainnya	56.037.396.458.509	18.350.918.480.869
4	Dana Perhitungan Fihak Ketiga	4.492.658.156.434	3.921.748.145.695
5	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	21.127.520.888.198	-
JUMLAH DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA		**148.155.907.631.641**	**52.253.149.048.677**

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya adalah uang yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Direktorat PKN melaporkan pos aset yang dibatasi penggunaannya sebagai bagian dari aset lainnya dalam rangka mencatat kegiatan untuk tujuan tertentu. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Neraca Tingkat Kuasa BUN Pusat tahun 2023 tercatat sebesar **Rp148.525.280.508.641** yang diantaranya sebesar Rp12.300.309.226.371 menampung dana cadangan penjaminan yang telah disajikan sebagai cadangan penjaminan dan dana pada RPATA yang telah disajikan sebagai Dana di Rekening Penampungan Kementerian/Lembaga sehingga dilakukan eliminasi. Perincian saldo dana yang dieliminasi dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Akun	Segmen Bank	Deskripsi	Saldo Akhir
1	163119	S0009	Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah (519000126980)	11.809.282.505.000
2	163119	S2040	Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (519000142980)	406.877.000.000
3	163134	90039	Rekening Investasi Pemerintah PEN (519000151980)	-
4	163139	90599	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	84.149.721.371
Total				**12.300.309.226.371**

Rekening Dana Yang Dibatasi Penggunaannya yang dikelola oleh Direktorat PKN adalah sebagai berikut :

1. Rekening Pembangunan Hutan (RPH) dan Rekening Cadangan Dana Reboisasi (DR) dibuka berdasarkan :

   a. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 06.1/PMK.01/ 2007 dan Nomor 02/MENHUT-11/2007 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan; dan

   b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.05/2007 tentang Pembukaan Rekening Pembangunan Hutan dan Penempatan Dana Reboisasi Pertama Kali dalam Rekening Pembangunan Hutan.

   Pengelolaan Rekening Pembangunan Hutan dan Rekening Cadangan Dana Rebosisasi dilakukan berdasarkan petunjuk-petunjuk teknis sebagai berikut:

   a. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 43/PB/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Pembangunan Hutan.

   b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 54/PB/2011 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bank Penyimpan Dana Cadangan.

   c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 86/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 54/PB/2011 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bank Penyimpan Dana Cadangan.

   d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 6/PB/2019 tentang Penyimpanan Dana Reboisasi pada Bank Umum.

   Rekening Pembangunan Hutan dan Rekening Cadangan Dana Reboisasi dibuka untuk menampung Dana Reboisasi (dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alami yang berupa kayu) untuk membiayai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan menggunakan sistem pinjaman dan dikelola dengan sistem dana bergulir.

   Transaksi penerimaan meliputi :

   a. penerimaan dalam rangka penyimpanan dana reboisasi ke dalam RPH; dan

   b. penerimaan bunga dan/atau jasa giro atas pengelolaan RPH.

   Transaksi pengeluaran meliputi :

   a. pengeluaran dalam rangka pemindahbukuan/transfer dari RPH ke Rekening KUN; dan

   b. pengeluaran dalam rangka pemindahbukuan/transfer penerimaan bunga dan/atau jasa giro atas pengelolaan RPH ke Rekening KUN.

   Pada Desember 2023 terdapat penggunaan SAL dari rekening pembangunan hutan berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-228/PB/PB.3/2023 tanggal 18 Desember 2023 hal Pencairan dan Pemindahbukuan Dana Deposito Rekening Pembangunan Hutan Tahun 2023 yang dilakukan pada tanggal 20 Desember 2023 sebesar

Rp2.225.200.000.000 sehingga saldo RPH & DR per 31 Desember 2023 adalah Rp2.321.678.110.595.

2. Rekening Dana Cadangan Alutsista dibuka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Rekening Dana Cadangan Alutsista adalah rekening yang dibuka untuk menampung dana titipan milik Kementerian Pertahanan yang digunakan untuk membiayai pengadaan alutsista yang tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran dan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. Sampai dengan akhir tahun 2023, terdapat 6 rekening Dana Cadangan Alutsista yang terdiri dari:

   a. Rekening Dana Cadangan Alutsista TNI AD (519000144980)

   b. Rekening Dana Cadangan Alutsista TNI AU (519000145980)

   c. Rekening Dana Cadangan Alutsista Kemhan (519000146980)

   d. Rekening Dana Cadangan Alutsista Mabes TNI (519000147980)

   e. Rekening Dana Cadangan Alutsista TNI AU dalam USD (609027411980)

   f. Rek Lain BI Dana Cadangan Alutsista TNI AL dalam IDR (519000154980)

   Jika masih terdapat sisa rekening dana cadangan alutsista sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam PMK 143/PMK.05/2018, maka Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktur PKN menyampaikan surat perintah penihilan saldo rekening dana cadangan alutsisa kepada KPA Satker dan dicatat sebagai pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu melalui potongan SPM. Dan jika KPA Satker tidak melakukan penihilan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam PMK, maka Menteri Keuangan c.q Dirjen Perbendaharaan langsung melakukan pemindahbukuan sisa dana dari rekening dana cadangan alutsista ke Rekening Kas Umum Negara.

3. Rekening Menteri Keuangan Pengeluaran untuk Surat Berharga Negara dibuka berdasarkan Kebijakan Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat untuk menampung dana penerbitan SBN dan dana pembayaran pokok, bunga utang dan kewajiban lainnya SBN yang jatuh tempo dengan Nama “Menteri Keuangan Pengelolaan Surat Berharga Negara”. Rekening ini terdiri dari 3 (tiga) rekening yaitu :

   a. Menteri Keuangan Pengeluaran untuk Surat Berharga Negara dalam Rupiah (502000001980);

   b. Menteri Keuangan Pengelolaan Surat Berharga Negara dalam valuta USD (609024411980);

   c. Menteri Keuangan Pengelolaan SBN EURO (609024991980).

   Pada Desember 2023 terdapat kebijakan prefunding yang dilakukan pemerintah yang dananya disimpan pada rek lain BI Pengelolaan SBN IDR dengan total sebesar Rp39.891.869.021.700.

4. Rekening Khusus Dana PFK dengan nomor 510000281980 dibuka berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-66/PB/2016 tentang Pemisahan Dana PFK dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Khusus Dana PFK yang digunakan untuk

menampung dana realisasi penerimaan PFK dalam rangka meningkatkan akurasi data monitoring dana PFK dan sebagai fungsi kontrol atas saldo dana pada Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

Pengelolaan rekening khusus dana PFK diatur dalam PMK 218/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pembukaan da Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara. Aliran Uang pada rekening ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber dana masuk berasal dari Rekening Kas Umum Negara.

b. Pengeluaran dana keluar berasal Nota Perintah Pemindahbukuan dana ke Rekening Kas Umum Negara dari Direktur PKN.

5. Rekening Lain BI BUN Untuk Obligasi Dalam Rangka Penjaminan dengan nomor 502000002980 dibuka dengan dasar :

   a. Keppres Nomor 120 Tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia serta Penerbitan Jaminan Bank Oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah untuk Pinjaman Luar Negeri.

   b. Keppres Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

   Rekening ini digunakan untuk menampung dana yang berasal dari penerbitan SU-004/MK/1999 tanggal 28 Mei 1999 dan digunakan untuk membayar kewajiban negara serta untuk menjamin bank umum apabila terjadi krisis moneter

   Aliran uang rekening :

   a. Sumber dana berasal dari penerbitan SU-004/MK/1999.

   b. Pengeluaran dana dari Rekening BUN untuk Obligasi dalam Rangka Penjaminan ditujukan ke bank penjamin.

6. Rekening Stabilisasi Surat Berharga Negara (500000006980) untuk menampung dana pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder dalam rangka stabilisasi pasar SBN domestik dan dibuka berdasarkan PMK nomor 188/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Penggunaan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka Stabilisasi Pasar Surat Berharga Negara Domestik. Ketentuan penggunaan saldo adalah berdasarkan kondisi pasar SBN domestik ditetapkan dalam level krisis berdasarkan protokol manajemen krisis pasar SBN oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri Keuangan dan mendapatkan persetujuan Badan Anggaran DPR.

7. Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan Untuk Menampung Pengembalian Dana Talangan Dan Pencairan Asset BPR (500000004980) dibuka dengan tujuan untuk menampung pengembalian dana talangan dan pencairan aset BPR. Dasar hukum pembukaan rekening adalah Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI tanggal 31 Januari 2001 tentang Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Pengelolaan Rekening ini diatur dalam:

a. PMK 218/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengelolaan R Rekening Milik Bendahara Umum Negara.

b. Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-40/PB/2014 tentang Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara melalui Sistem Bank Indonesia *Government-Electronic Banking* (BIG-eB).

Kebijakan pencairan dana pada rekening ini dilakukan setelah status hukum Aset BPR sebagai milik pemerintah sudah jelas. Aliran kas masuk dan kas keluar dari rekening ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber dana berasal dari pengembalian dana talangan dan pencairan aset BPR.

b. Pengeluaran/pencairan dana berdasarkan kebijakan.

8. Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah (519000126980) atau disebut RDCPP ini diperlukan dalam hal anggaran kewajiban penjaminan pemerintah yang telah dialokasikan dalam APBN tidak habis digunakan dalam tahun berjalan. Anggaran dimaksud dapat diakumulasikan dengan mekanisme pemindahbukuan ke dalam rekening tersebut yang dibuka di Bank Indonesia untuk pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah pada tahun anggaran yang akan datang.

   Dasar hukum pembukaan rekening:

   a. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.

   b. Peraturan Menteri Keuangan nomor 30/PMK.8/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

   Pengelolaan RDCPP ini diatur menggunakan petunjuk teknis sebagai berikut:

   a. Peraturan Menteri Keuangan nomor 69 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan untuk Pelaksanaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

   Dirjen Pengelolaan Utang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah mengajukan permintaan pembukaan RDCPP kepada Kuasa BUN Pusat dan berdasarkan permintaan tersebut Dirjen Perbendaharaan mengajukan permintaan pembukaan RDCPP kepada Bank Indonesia melalui surat Direktur Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran di Bank Indonesia nomor 14/892/DASP tanggal 19 Desember 2013 hal Pembukaan Rekening. Alokasi anggaran kewajiban penjaminan pemerintah untuk:

   a. Program penjaminan percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW PT PLN (Persero);

   b. Program penjaminan percepatan penyediaan air minum;

   c. Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada Badan Usaha Milik Negara;

   d. Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera;

e. Pemberian Jaminan Pemerintah Untu.k Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;

f. Penjaminan lainnya yang diterbitkan Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan

g. Pembayaran kewajiban Kementerian/Lembaga untuk memenuhi kewajiban regres kepada Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dalam pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha DISTRIBUSI II Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

Aliran kas masuk dan kas keluar dari rekening ini dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Dana masuk berasal dari pencairan alokasi DIPA Dana Kewajiban Penjaminan Pemerintah yang tidak habis dipergunakan sampai dengan akhir dalam tahun anggaran berjalan oleh DJPPR sebagai KPA ke RDCPP.

b. Dana keluar dari RDCPP akan disalurkan ke penerima jaminan atas permintaan KPA guna melunasi kewajiban Pemerintah akibat pemberian jaminan apabila pihak terjamin tidak dapat membayar kewajibannya dengan kondisi sebagai berikut:

1) Anggaran Kewajiban Penjaminan tidak dianggarkan dalam APBN tahun anggaran berjalan.

2) Anggaran Kewajiban Penjaminan dianggarkan dalam APBN tahun anggaran berjalan tetapi tidak mencukupi; atau

3) Sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak dapat memenuhi kewajiban Kementerian/Lembaga kepada BUPI.

9. Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (519000142980) atau disebut Rekening DJPPID adalah rekening yang akan digunakan untuk menampung dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, hasil pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil, dan/atau sumber-sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka membayar terlebih dahulu sebagaimana telah diatur dalam PMK 125/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah, dimana nantinya rekening digunakan sebagai rekening penampungan alokasi anggaran kewajiban jaminan pemerintah atas penugasan pembiayaan infrastruktur daerah dalam hal tidak digunakan pada tahun anggaran berjalan dan penampungan dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH. Kemudian, dalam hal tidak terdapat alokasi anggaran kewajiban jaminan pemerintah atas penugasan pembiayaan infrastruktur daerah atau dana pada alokasi dimaksud tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI), maka rekening dimaksud juga digunakan untuk membayar kewajiban penjaminan pemerintah kepada PT. SMI. rekening DJPPID dimaksud dikategorikan pada Rekening Lainnya Milik BUN.

10. Rekening Investasi Pemerintah PEN (519000151980) adalah Rekening milik BUN yang dibuka di Bank Indonesia pada tahun 2020 berdasarkan KMK 533/KMK.06/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada Rekening Milik BUN. Rekening tersebut digunakan untuk mengelola dana

investasi Pemerintah dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional yaitu untuk menampung pencairan dana, pengembalian pokok dan pendapatan hasil investasi Pemerintah PEN. Dana investasi Pemerintah tersebut ditujukan kepada penerima investasi sebagaimana diatur dalam KMK 525/KMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 381/KMK.02/2020 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun Anggaran 2020.

11. Rek Lain BI Investasi Bendahara Umum Negara (513000001980)

Rekening Investasi Bendahara Umum Negara yang disingkat RIBUN adalah rekening yang dibuka untuk menampung dana dan/atau imbal hasil Investasi Pemerintah. Rekening tersebut dibuka di Bank Indonesia dengan nama Rekening Lain BI Investasi Bendahara Umum Negara dengan nomor 5120000001980 degan dasar hukum sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah.
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah.
c. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2022 tentang Tata Kelola Rekening Investasi Bendahara Umum Negara.
d. Surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-276/PB/PB.3/2021 tanggal 20 Nopember 2021 hal Permohonan Pembukaan Layanan Jasa Kebanksentralan Layanan Rekening Giro di Bank Indonesia.
e. Surat Bank Indonesia nomor 23/189/DPPT/Srt/B tanggal 30 Nopember 2021 hal Permohonan Pembukaan Layanan Jasa Kebanksentralan Layanan Rekening Giro di Bank Indonesia.

RIBUN bersifat kumulatif dan berfungsi untuk:

a. menyalurkan dana Investasi Pemerintah kepada OIP;
b. menerima dana Investasi Pemerintah beserta imbal hasilnya dari OIP; dan
c. mengkonsolidasikan pencatatan dana Investasi Pemerintah yang dilakukan oleh BUN melalui OIP.

Sampai dengan 31 Desember 2023, penerimaan RIBUN bersumber dari pencairan dana Investasi Pemerintah untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari RKUN ke RIBUN yang akan disalurkan ke OIP, dalam hal ini adalah BP Tapera senilai Rp19.480.000.000.000. Selain itu, penerimaan pada RIBUN juga berasal dari penyetoran hasil investasi pemerintah dan pengembalian pokok investasi dari OIP yang sampai dengan September Tahun 2023 sebesar Rp517.756.140.530 miliar merupakan penerimaan imbal hasil Investasi Pemerintah sampai dengan periode 31 Desember 2023.

Sedangkan pengeluaran RIBUN selama Tahun 2023 dilakukan untuk penyaluran Investasi Pemerintah untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari RIBUN ke rekening BP Tapera di Bank Umum senilai Rp19.480.000.000.000. Selain penyaluran investasi Pemerintah, pengeluaran RIBUN juga terjadi atas pemindahbukuan hasil investasi pemerintah

dan pokok investasi dari RIBUN ke RKUN atas perintah Menteri Keuangan untuk diperlakukan sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak.

12. Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda

Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh BUN bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran Transfer ke Daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Sentral (Bank Indonesia). Bentuk penyimpanan adalah overnight pada rekening lain BI Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah Pemerintah Daerah (TDF-TKD Pemda) yang dibuka di Bank Indonesia dengan dasar hukum pembukaan rekening sebagai berikut:

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Depocit Facility.

c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.5/2023 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Treasury Deposit Facility dalam Rangka Penyaluran Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 Dalam Bentuk Nontunai.

d. Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-143/PB/PB.3/2023 tanggal 21 Desember 2023, S-144/PB/PB.3/2023 tanggal 22 Desember 2023 dan S-146/PB/PB.3/2023 tanggal 23 Desember 2023 hal Permohonan Pembukaan Layanan Jasa Kebanksentralan Layanan Rekening Giro di Bank Indonesia.

e. Surat Bank Indonesia nomor 24/272/DPPT/Srt/B tanggal 26 Desember 2023, 24/273/DPPT/Srt/B tanggal 27 Desember 2023 dan 24/275/DPPT/Srt/B tanggal 27 Desember 2023 hal Persetujuan Pembukaan Rekening Giro di Bank Indonesia.

f. Surat Bank Indonesia nomor 25/299/DPPT/Srt/B tanggal 28 Desember 2023 hal hal Persetujuan Pembukaan Rekening Giro di Bank Indonesia.

Sampai dengan 31 Desember 2023, terdapat 546 rekening lain BI TDF-TKD Pemda dengan total saldo Rp66.498.332.128.500.

13. Rekening Lain BI Penampungan Akhir Tahun Anggaran

Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) merupakan rekening lain-lain milik BUN yang dibuka di Bank Indonesia dengan nomor rekening 519000700980 untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara s.d. tanggal 31 Desember TA berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir TA yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada TA berikutnya. Dasar hukum pembukaan rekening sebagai berikut:

a. Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 109 tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran.

b. Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-184/PB/PB.3/2023 tanggal 13 November 2023 hal Permohonan Pembukaan Layanan Jasa Kebanksentralan Layanan Rekening Giro di Bank Indonesia.

c. Surat Bank Indonesia nomor 25/275/DPPT/Srt/B tanggal 28 November 2023 hal Persetujuan Pembukaan Rekening Giro di Bank Indonesia.

Sampai dengan 31 Desember 2023 saldo RPATA yang sebesar Rp21,12 triliun.

D.2.1.6.2.2. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.03

Dana yang dibatasi penggunaanya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp4.847.519.139.589 dengan Rincian sebagai berikut:

1. Dana Cadangan IP PEN

Dana Cadangan IP PEN merupakan dana yang disisihkan dalam RIPPEN untuk menampung kebutuhan pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN bagi penerima Investasi yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran Investasi Pemerintah yang berada di Rekening Investasi Pemerintah Pemulihan Ekonomi Nasional (RIPPEN). Penyaluran dana kepada BUMN penerima investasi. dapat dilakukan apabila telah terpenuhi klausul- klausul-klausul pada Perjanjian Investasi, dimana pemenuhannya akan didapatkan informasinya oleh KPA dari Pelaksana Investasi.

Dana Cadangan IP PEN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp4.847.519.139.589. Dana tersebut berkurang signifikan dikarenakan adanya pengembalian dana PMN yang dialokasikan untuk PT Waskita Karya (Persero) sebesar Rp3.000.000.000.000 dan dana IPPEN PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebesar Rp800.000.000.000, serta pencairan alokasi IPPEN kepada PTPN III sebesar Rp1.047.519.139.000.

Adapun rincian mutasi penyaluran dana pada RIPPEN ke BUMN Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Penerima Investasi	Dana pada 31 Des 2022	Penyetoran ke RKUN	Pencairan dari RIPPEN ke BUMN Penerima Investasi	Dana pada 31 Desember 2023
PT Perkebunan Nusantara III	1.047.519.139.589	589	1.047.519.139.000	-
PT Krakatau Steel	800.000.000.000	800.000.000.000	-	-
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000	-	-
	4.847.519.139.589	**3.800.000.000.589**	**1.047.519.139.000**	**-**

D.2.1.6.2.3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.07

Jumlah Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0 dan Rp20.000.000. Jumlah Dana yang Dibatasi Penggunaannya tersebut mengalami penurunan sebesar Rp20.000.000 atau 100 persen dari Jumlah Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2022.

D.2.1.6.2.4. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.08

Saldo Dana yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp51.085.061.052.125 dan Rp49.537.201.072.544. Dana lainnya merupakan dana yang dibatasi penggunaannya yang Terdiri dari:

1. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 Satker SKK Migas sebesar Rp51.000.911.330.754 dan Rp47.537.201.072.544 yang merupakan dana kegiatan pasca-operasi dan Pemulihan Lingkungan atau *Abandonment and Site Restoration* (ASR) dalam kegiatan usaha hulu migas. Saldo tersebut merupakan konversi saldo ASR sebesar USD3,303,381,781.90 menggunakan kurs penutup BI Desember Tahun 2023 sebesar Rp15.439. Mutasi saldo dana ASR tersebut sebagai berikut:

Uraian	Nilai (USD)
Saldo Awal	3,035,447,304.55
Mutasi tambah	272,345,642.35
Mutasi kurang:	(4,411,165.00)
Saldo Akhir USD	**USD3,303,381,781.90**
Saldo Akhir Rupiah	**Rp51.000.911.330.754**

Dana ASR adalah akumulasi dana yang dicadangkan semata-mata untuk melaksanakan kegiatan ASR yang disetorkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ke Rekening Bersama SKK Migas dan KKKS yang digunakan hanya untuk pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu migas. Kegiatan Abandonment and Site Restoration (ASR) atau Kegiatan Pasca Operasi adalah kegiatan untuk penutupan sumur secara permanen, penghentian pengoperasian dan menghilangkan kemampuan Fasilitas Produksi dan fasilitas penunjang untuk dapat dioperasikan kembali termasuk pembongkarannya secara permanen serta melakukan pemulihan lingkungan di Wilayah Kerja pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Sesuai PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas Pasal 36, KKKS sebagai pelaksana kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di Indonesia, wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan pasca operasi kegiatan hulu migas. Kewajiban tersebut dilakukan sejak dimulainya masa eksplorasi dan dilaksanakan melalui rencana kerja dan anggaran. Pengeluaran yang terjadi dalam penanganan pasca operasi sumur eksplorasi dan pemulihan lokasi pemboran akan dibebankan sebagai Biaya Operasi (cost recoverable). Dana ASR dapat diajukan cost recovery pada saat bersamaan setelah KKKS melakukan penyetoran ke rekening bersama.

Kesepakatan substansi pengaturan kebijakan akuntansi Dana ASR tersebut ditindaklanjuti

dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-34/MK.5/2021 tanggal 23 Mei 2021 hal Kebijakan Akuntansi Pencatatan Dana Abandonment & Site Restoration Yang Ditempatkan pada Rekening Bersama Antara SKK Migas dan KKKS Terkait Kegiatan Hulu Migas, yang mengatur kebijakan akuntansi pencatatan Dana Abandonment & Site Restoration (ASR) sebagai berikut:

a. Kebijakan akuntansi dimaksud telah diatur sebelumnya dalam surat nomor S-9405/MK.5/2015 tanggal 6 November 2015 yang didalam pengaturannya disebutkan bahwa untuk Rekening Dana ASR on face dalam laporan keuangan disajikan sebagai Aset Yang Dibatasi Penggunaanya (debet) dan Kewajiban Tidak Lancar (kredit) pada Laporan Keuangan SKK Migas selaku Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker;

b. Untuk kepentingan transparansi dan akuntabilitas, penyajian Saldo Rekening Dana ASR on face dalam laporan keuangan perlu disempurnakan menjadi disajikan sebagai Aset/Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (debet) dan Kewajiban Tidak Lancar (kredit) pada Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN);

c. Selanjutnya agar SKK Migas dapat menyampaikan perhitungan jumlah Saldo Rekening Dana ASR dari Kontrak Kerjasama yang menggunakan mekanisme pengembalian biaya operasi (Cost Recovery) maupun dari Kontrak Kerjasama yang berbentuk Kontrak Bagi Hasil Gross Split, disertai penjelasan yang memadai untuk proses pencatatannya pada LKBUN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP);

d. Ketentuan mengenai Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Dana ASR sebagaimana pengaturan sebelumnya dalam Surat Menteri Keuangan nomor S-9405/MK.5/2015 tanggal 6 November 2015 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan maksud surat ini;

e. Kebijakan akuntansi ini dilaksanakan oleh Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara dalam Penyusunan LKBUN untuk dikonsolidasikan ke dalam LKPP yang mulai diberlakukan sejak pelaporan tahun 2020.

Pencatatan tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2020 Nomor : 25b/LHP/XV/05/2021 tanggal 29 Mei 2021, yaitu pengaturan yang lebih detil atas kebijakan akuntansi dan mekanisme pelaporan atas pencadangan Dana ASR, termasuk Dana ASR yang dikelola oleh BPMA. Hal tersebut berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-14/PB/PB.6/2022 tanggal 4 Maret 2022 hal Pengaturan Lebih Lanjut Atas Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Atas Pencadangan Dana Abandonment and Site Restoration (ASR) Yang Ditempatkan Pada Rekening Bersama Antara SKK Migas/BPMA dan KKKS Terkait Kegiatan Hulu Migas dan surat Kuasa Pengguna Anggaran SKK Migas Nomor SRT-0032/SMKPA0000/2022/S4 tanggal 8 Maret 2022 hal Laporan Keuangan Belanja Lain-Lain (BA 999.08) Satker SKK Migas Tahun 2021.

2. Saldo Dana di Rekening Penampungan-K/L per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp84.149.721.371 dan Rp0. Dana di Rekening Penampungan-K/L merupakan Dana Pada Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran

(RPATA).

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2023	31 Desember 2022
015	Kementerian Keuangan	45.004.622.761	-
-	MPP Kartu Pekerja	5.745.773.362	-
-	SKK Migas	33.399.325.248	-
Total		**84.149.721.371**	-

D.2.1.6.2.5. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.99

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp259.362.135.477.663 dan Rp229.976.687.840.546, terdapat kenaikan Rp29.385.447.637.117 atau 12,78% jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2022.

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan) Rp)
AIP yang dikelola PT Taspen (Persero)	231.572.672.909.516	205.285.435.523.564	26.287.237.385.952
AIP yang dikelola PT Asabri (Persero)	27.789.462.568.147	24.691.252.316.982	3.098.210.251.165
Total Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	**259.362.135.477.663**	**229.976.687.840.546**	**29.385.447.637.117**

Catatan:

- Berdasarkan Laporan Keuangan AIP TA. 2023 Audited PT. Taspen (Persero) tanggal 25 Maret 2024 disebutkan bahwa saldo AIP PT. Taspen (Persero) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp231.572.672.909.516;
- Berdasarkan Laporan Keuangan AIP TA. 2023 Audited PT. ASABRI (Persero) tanggal 29 Februari 2024 disebutkan bahwa saldo AIP PT. ASABRI (Persero) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp27.789.462.568.147.

D.2.1.6.3. DANA CADANGAN PENJAMINAN

Dana Cadangan penjaminan adalah dana yang dicadangkan untuk menjamin berlangsungnya proyek pembangunan pemerintah.

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Dana Penjaminan EAS	11.809.282.505.000	11.513.131.000.000
Dana Penjaminan PRKN	406.877.000.000	372.517.000.000
Total	**12.216.159.505.000**	**11.885.648.000.000**

Dana Penjaminan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 Audited adalah sebesar Rp12.216.159.505.000 dan Rp11.885.648.000.000. Pada Tahun 2019, Berdasarkan Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 220/KMK.08/2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah disepakati bahwa pencatatan atas saldo dana cadangan penjaminan (pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN) dialihkan dari satker 999986 (Direktorat PRKN) ke satker 970974 (Direktorat EAS).

Terdapat dua KPA Dana Penjaminan yakni Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dan Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen.

Dana Penjaminan yang dikelola Direktorat EAS sebesar Rp11.809.282.505.000 digunakan untuk:

1. Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I);
2. Percepatan Penyediaan Air Minum;
3. Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN;
4. Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera;
5. Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas (Proyek 10.000 MW Tahap 2);
6. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Proyek infrastruktur dengan skema KPBU);
7. Penyelengaraan Light Rail Transit/LRT Jabodebek.
8. Pemulihan Ekonomi Nasional Penjaminan untuk Pelaku Usaha Korporasi
9. Pemulihan Ekonomi Nasional Penjaminan untuk Pelaku Usaha UMKM.

Adapun Dana Penjaminan yang dikelola oleh Direktorat PRKN adalah sebesar Rp406.877.000.000 yang merupakan dana penjaminan atas penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam rangka penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah.

Dana Penjaminan dengan total sebesar Rp406.877.000.000 ditampung di rekening Bank Indonesia pada nomor rekening 519.000142980 dengan nama rekening “Rek Lain BI Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur”, yang merupakan rekening penempatan dalam rupiah yang pembayaran bunganya disetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Negara dalam Rupiah pada akhir bulan berjalan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 17/KMK.05/2009 dan 11/3/KEP.GBI/2009 tentang Koordinasi Pengelolaan Uang Negara.

D.2.1.6.4. DANA KELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM

Nilai dana kelolaan BLU yang belum digulirkan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp16.047.968.379.573 dan Rp10.340.470.045.889.

Dana kelolaan BLU yang belum digulirkan adalah dana yang dikelola oleh BLU pengelola dana yang bersumber dari BA 999.03 atau pengalihan dari Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang belum digulirkan atau diinvestasikan sesuai dengan pengganggarannya atau merupakan dana yang berasal dari pengembalian pokok perguliran atas investasi, dan belum digulirkan atau diinvestasikan kembali.

Rincian dana kelolaan pada masing-masing BLU adalah sebagai berikut:

No	Instansi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	BLU Pusat Investasi Pemerintah	1.980.224.478.455	3.359.710.949.023
2	BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (Dit. SMI)	2.956.427.625.499	699.864.758.682
3	BLU Lembaga Penyalur Dana Bergulir KUMKM	1.193.503.022.225	1.222.484.034.252
4	BLU LPMUKP	475.451.437.165	712.990.058.259
5	BLU Lembaga Manajemen Aset Negara	1.266.323.666.466	1.286.798.335.585
6	BLU BPDLH (Pengelola dana bersama penanggulangan bencana dan dana DNS)	7.359.964.509.287	3.058.621.910.088
7	BLU BPDLH (Mangrove)	795.002.450.000	-
8	BLU BPDKS	21.071.190.476	-
	JUMLAH	**16.047.968.379.573**	**10.340.470.045.889**

1. Dana Kelolaan pada BLU PIP

Dana Kelolaan BLU PIP yang belum digulirkan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.980.224.478.455 dan Rp3.359.710.949.023. Terjadi penurunan sebesar Rp1.379.486.470.568 atau 41,06 persen dari tahun sebelumnya, disebabkan telah digulirkannya dana kelolaan kepada Lembaga Keuangan Non Bank oleh PIP.

Adapun rincian penempatan dana kelolaan BLU PIP adalah sebagai berikut:

No	Bank	No Rekening	Jumlah
1	BNI (Giro)	2018220615	116.360.023.283
2	BRI (Giro)	0329-01-003827-30-6	59.837.846.840,75
3	Mandiri (Giro)	103-00-10816995	104.451.190.476
4	BNI (Deposito)	181-409-7863	620.000.000.000
5	BNI (Deposito)	181-410-0016	400.000.000.000
6	BNI (Deposito)	0329-0105-0520-40-0	380.000.000.000
7	BNI (Deposito)	0329-0105-0521-40-6	300.000.000.000
Jumlah			**1.980.649.060.599,75**

Terdapat selisih antara catatan akuntansi dan rekening koran sebesar Rp424.582.144,75 merupakan pendapatan jasa giro di BNI yang belum dilimpahkan ke rekening operasional PIP

sebesar Rp424.582.083 dan Rp61,75 yang merupakan akumulasi kelebihan setor penerimaan pokok karena pembulatan.

2. Dana Kelolaan pada BLU Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (Dit. SMI)

Dana kelolaan pada BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) merupakan dana kelolaan yang diserahterimakan dari BLU P3H. Nilai dana kelolaan BLU BPDLH per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.956.427.625.499 dan Rp699.864.758.682, terjadi kenaikan sebesar Rp2.256.562.866.817 atau 322,43% dari tahun sebelumnya yang disebabkan adanya penambahan pembiayaan investasi kepada BLU BPDLH pada tahun 2023 senilai Rp2.225.200.000.000.

3. Dana Kelolaan pada BLU Lembaga Pengelola Dana bergulir KUMKM

Nilai Dana Kelolaan Badan Layanan Umum LPDB-KUMKM per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.193.503.022.225 dan Rp1.222.484.034.252. Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang masih berupa kas yang belum disalurkan sebagai pinjaman/pembiayaan dana bergulir kepada mitra LPDB-KUMKM. Dana Kelolaan BLU terdiri dari pengembalian pokok dana bergulir dan program Kementerian Koperasi dan UKM pada saldo pengelolaan pokok dana bergulir BA 999.03.

Saldo Rekening Giro per 31 Desember 2023 sebesar Rp167.537.356.596 dan nilai deposito sebesar Rp1.031.800.000.000, dengan total nilai yang ada di rekening pokok sebesar Rp1.199.337.356.596, kemudian dilakukan rekonsiliasi sebesar minus Rp5.834.334.371, sehingga dana kelolaan akhir Badan Layanan Umum LPDB-KUMKM per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.193.503.022.225 yang merupakan dana bergulir yang siap untuk disalurkan pada tahun 2023.

Pada nilai dana kelolaan sebesar Rp1.193.503.022.225 termasuk di dalamnya pembayaran piutang oleh mitra Koperasi Kampus Unsoed dengan mencairkan klaim subrogasi mitra atas nama kepada Lembaga Penjamin Kredit (Jamkrida Jawa Tengah) sebesar Rp860.633.286, mitra KSU Monjari 45 sebesar Rp348.412.800, BMT Bina Umat Mulia kepada Lembaga Penjamin Kredit (Jamkrindo) sebesar Rp140.961.811, dan Koperasi Produsen Cahaya Multi Indonesia kepada Lembaga Penjamin Kredit (Jamkrida Riau) sebesar Rp400.000.000.

4. Dana Kelolaan pada BLU LPMUKP

Dana Kelolaan BLU LPMUKP yang belum Digulirkan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp475.451.437.165 dan Rp712.990.058.259. Terjadi penurunan Aset Lainnya berupa Dana Kelolaan Badan Layanan Umum sebesar Rp237.538.621.094 atau 33,32 persen karena meningkatnya realisasi pencairan Dana Bergulir.

Dari total nilai pada Dana Kelolaan pada tahun 2023 tersebut terdapat perbedaan antara nilai dana kelolaan yang tersaji dengan total nilai dana kelolaan pada rekening koran per 31 Desember 2023 sebesar Rp68.114.667, merupakan angsuran pokok debitur yang disetorkan oleh debitur ke rekening operasional penerimaan dan belum dipindahbukukan ke rekening dana kelolaan per 31 Desember 2023. Angsuran pokok tersebut baru dipindahbukuan ke rekening

dana kelolaan BRI sebesar Rp57.948.000 pada tanggal 22 Januari 2024 dan rekening dana kelolaan BNI sebesar Rp10.166.667.

5. Dana Kelolaan pada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara

Nilai dana kelolaan pada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.266.323.666.466 dan Rp1.286.798.335.585. Terjadi penurunan sebesar Rp20.474.669.119 atau 1,59 persen.

Uraian	Nominal (Rp)
Posisi per 31 Desember 2022	1.286.798.335.585
(-) Penggunaan dana untuk *upgrade* properti investasi eks BPPN	(1.463.601.745)
(-) Penggunaan dana untuk *upgrade* properti investasi eks PPA	(12.145.996.020)
(-) Penggunaan dana untuk *upgrade* aset properti investasi eks Pertamina	(316.723.421)
(-) Penggunaan dana untuk *upgrade* properti investasi eks HTBI	(6.505.436.129)
(-) Penggunaan dana untuk *upgrade* properti investasi lainnya	(42.911.804)
Posisi per 31 Desember 2023	**1.266.323.666.466**

Penggunaan dana investasi untuk upgrade aset kelolaan dan penebusan HTBI yang dirinci per tahun adalah sebagai berikut:

Uraian	Nominal (Rp)
Alokasi APBN-P TA 2015	1.500.000.000.000
(-) Penggunaan di tahun 2016	(26.734.113.000)
(-) Penggunaan di tahun 2017	(54.778.165.126)
(-) Penggunaan di tahun 2018	(11.908.277.761)
(-) Penggunaan di tahun 2019	(16.608.319.662)
(-) Penggunaan di tahun 2020	(65.868.718.321)
(-) Penggunaan di tahun 2021	(20.247.945.147)
(-) Penggunaan di tahun 2022	(17.056.125.398)
(-) Penggunaan di tahun 2023	(20.474.669.119)
Posisi per 31 Desember 2023	**1.266.323.666.466**

6. Dana Kelolaan pada BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (Pengelola dana bersama penanggulangan bencana dan dana DNS)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 407/KMK.010/2021 tentang Penugasan Kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Untuk Melaksanakan Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana, BPDLH ditunjuk menjadi pengelola dana PFB. Selanjutnya, berdasarkan KMK nomor 393/KMK.06/2022 tanggal 28 September 2022, Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana BLU BPDLH ditetapkan menjadi KPA BUN BA 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Dana Bersama Penanggulangan Bencana

(PFB) dan dana DNS.

Dana kelolaan pada BLU BPDLH per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.359.964.509.287 dan Rp3.058.621.910.088. Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang berasal dari BA 999.03 pengelolaan dana bersama penanggulangan bencana dan dana DNS, dengan rincian dana bersama penanggulangan bencana sebesar Rp7.300.000.000.000 dan dana DNS sebesar Rp59.964.509.287.

Dana Bersama Penanggulangan Bencana merupakan dana cadangan yang dikelola dengan mekanisme dana abadi. Adapun dana bersama penanggulangan bencana ini juga dialokasikan sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan dalam pinjaman luar negeri IBRD 9197-ID (Indonesia Disaster Risk Finance and Insurance). Dana Kelolaan Pokok diinvestasikan, untuk kemudian imbal hasil investasinya digunakan untuk mendanai kegiatan terkait bencana. Sesuai dengan draft peraturan teknis terkait pengelolaan dana ini, dalam hal tertentu, Dana Pokok dapat digunakan untuk pendanaan bencana. Dana Bersama Penanggulangan Bencana (DBPB) / Pooling Fund Bencana (PFB) dicairkan dalam dua kali pencairan, yaitu sebesar Rp3.000.000.000.000 pada tahun 2022 dan Rp4.300.000.000.000 pada tahun 2023, sehingga per 31 Desember 2023 berjumlah Rp7.300.000.000.000.

Nilai dana DNS sebesar Rp59.964.509.287 merupakan pengalihan dana DNS yang diawalnya dicatat pada UAIP menjadi dicatat pada BLU BPDLH sesuai BAST antara UAIP dan UAKPA BLU BPDLH Nomor BA-14/KN.3/2022 dan BAST24/BPDLH.2/2022 tanggal 2 November 2022.

7. Dana Kelolaan pada BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Nilai dana kelolaan pada BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp21.071.190.476 dan Rp0. Terjadi kenaikan sebesar Rp21.071.190.476 atau 100 persen. Nilai tersebut berasal dari amortisasi premium atas penempatan investasi jangka Panjang non permanen lainnya dalam bentuk Surat Berharga Negara yang memenuhi karakteristik HTM diperoleh secara premium.

D.2.1.6.5. DANA JANGKA PANJANG

Posisi pos Dana Jangka Panjang pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp36.015.899.438.036 dan Rp28.798.237.380.309, terdapat kenaikan sebesar Rp7.217.662.057.727 atau 25,06%.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara, dana jangka panjang adalah dana hasil akumulasi dari pembiayaan beserta hasil pengelolaannya untuk Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional, yang dikelola oleh LMAN.

Pada tahun 2020, melalui surat nomor S-941/PB/2020 tanggal 29 Desember 2020 hal Ketentuan Lebih Lanjut Pengesahan Belanja Modal dan Penerimaan Pembiayaan atas Pengadaan Tanah bagi PSN oleh LMAN dalam PER-20/PB/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2020, Direktorat Jenderal Perbendaharaan

menerbitkan kebijakan penyajian atas dana investasi untuk pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional pada pos Dana Jangka Panjang (165211). Sebelumnya, penyajian atas dana tersebut dilakukan pada pos Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan.

Mutasi tambah dan kurang untuk pos Dana Jangka Panjang di tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian		Nominal (Rp)
Posisi per 31 Desember 2022		28.798.237.380.309
(-)	Penggunaan dana untuk pembayaran langsung	(17.142.475.041.821)
(-)	Penggunaan dana untuk penggantian dana talangan	(1.064.608.892.506)
+	Penambahan dana dari pencairan alokasi APBN TA 2023	25.424.000.000.000
+	Retur/pengembalian dana atas transaksi sebelum tahun 2023	745.992.054
Posisi per 31 Desember 2023		**36.015.899.438.036**

Penerimaan dan penggunaan dana jangka panjang untuk pendanaan pengadaan tanah PSN yang dirinci per tahun sejak 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Uraian		Nominal (Rp)
	Alokasi APBN-P TA 2016	16.000.000.000.000
	Alokasi APBN-P TA 2017	32.050.560.000.000
	Alokasi APBN TA 2018	31.152.730.000.000
	Alokasi APBN TA 2019	12.000.000.000.000
	Alokasi APBN TA 2021	11.123.000.000.000
	Alokasi Pembiayaan dari SAL TA 2021	3.300.000.000.000
	Pencairan Alokasi APBN TA 2022	28.840.000.000.000
	Pencairan alokasi APBN TA 2023 s.d. 31 Desember 2023	25.424.000.000.000
(-)	Penggunaan di tahun 2017 untuk penggantian dana badan usaha	(11.722.231.996.179)
(-)	Penggunaan di tahun 2018 untuk penggantian dana badan usaha	(19.789.900.738.239)
(-)	Penggunaan di tahun 2018 untuk pembayaran langsung	(1.461.797.730.377)
(-)	Penggunaan di tahun 2019 untuk penggantian dana badan usaha	(11.255.023.776.662)
(-)	Penggunaan di tahun 2019 untuk pembayaran langsung	(2.622.078.588.471)
(-)	Penggunaan di tahun 2020 untuk penggantian dana badan usaha *)	(16.188.530.391.558)
(-)	Penggunaan di tahun 2020 untuk pembayaran langsung	(3.766.644.434.006)
(+)	Retur/pengembalian dana atas penggantian dana talangan proyek jalan tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar	21.928.205.059
(+)	Retur/pengembalian dana atas penggantian pembayaran langsung proyek LRT Jabodebek	19.012.419.000
(-)	Penggunaan di tahun 2021 untuk penggantian dana Badan Usaha *)	(7.075.903.330.513)
(-)	Penggunaan di tahun 2021 untuk pembayaran langsung	(15.783.555.647.233)
(+)	Retur/pengembalian dana atas penggantian dana talangan proyek Jalan Tol Pandaan-Malang, Serang-Panimbang, Ciawi-Sukabumi dan Cinere-Serpong	1.877.307.181
(-)	Penggunaan di tahun 2022 untuk penggantian dana Badan Usaha *)	(2.977.320.020.714)
(-)	Penggunaan di tahun 2022 untuk pembayaran langsung	(13.069.743.347.352)

Uraian		Nominal (Rp)
(+)	Retur/pengembalian dana atas proyek Jalan Tol Ciawi Sukabumi	1.859.450.374
(-)	Penggantian dana talangan	(1.064.608.892.506)
(-)	Pembayaran langsung	(17.142.475.041.822)
(+)	Retur penggantian dana talangan	326.766.505
(+)	Retur pembayaran langsung	419.225.549
Posisi per 31 Desember 2023		**36.015.899.438.036**

Penggunaan dana jangka panjang pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang dirinci per proyek adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Proyek Air Baku	22.945.264.480	45.194.933.400
Proyek Bendungan	1.969.712.922.391	3.483.829.231.990
Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara	1.426.137.165.291	-
Proyek Irigasi	31.769.023.220	67.268.122.796
Proyek Jalan Tol	14.396.683.929.514	12.172.219.871.831
Proyek Kawasan Strategis	-	314.682.000
Proyek Pelabuhan	975.468.666	75.649.491.460
Proyek Perkeretaapian	358.114.168.711	202.587.034.586
Jumlah Penggunaan Dana s.d. 31 Des 2023	**18.206.337.942.273**	**16.047.063.368.063**

D.2.1.6.6. ASET LAIN-LAIN

Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp644.945.117.418.303 dan Rp614.634.699.183.703, mengalami kenaikan sebesar Rp30.310.418.234.600 atau (4,93%). Nilai per tanggal 31 Desember 2023 terdiri dari aset KKKS, aset PKP2B, aset lainnya BLBI, aset ABMA/T, aset BMN Idle, Aset Eks Pertamina dan Aset Lain-lain.

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Aset KKKS Hulu Migas pada DJKN	17.161.363.257	8.148.384.448
2.	Aset KKKS Hulu Migas pada PPBMN	104.061.918.709	5.725.853.761
3.	Aset KKKS Hulu Migas pada SKK Migas	615.910.897.460.531	586.653.132.958.891
4.	Aset KKKS Hulu Migas pada BPMA	14.331.042.210.113	13.955.186.333.525
5.	Aset PKP2B	2.941.049.250.958	2.489.221.624.116
6.	Aset Lainnya BLBI	10.355.953.839.630	10.279.524.386.452
7.	Aset ABMA/T	37.267.219.100	37.668.763.100
8.	Aset BMN Idle	20.081.172.095	32.894.062.705
9.	Aset Lain-lain	362.572.834.719	362.543.093.041

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
10.	Aset Lain-lain 999.03	822.118.554.755	810.653.723.664
11.	Aset Lain-lain 999.08	42.911.594.436	-
	Jumlah	**644.945.117.418.303**	**614.634.699.183.703**

D.2.1.6.6.1. Aset KKKS Hulu Migas pada DJKN

Aset lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.161.363.257. Aset lainnya tersebut berupa tanah yang merupakan himpunan dari BMN Hulu Migas yang telah diserahkan ke Pengelola Barang dari KKKS Terminasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Aset eks Pan Orient Energy (Citarum) Pte. Ltd berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Citarum (Kementerian ESDM kepada Kementerian Keuangan) Nomor 16.BA/92/SJA.4/2020 dan Nomor BA-1/KN.4/2020 tanggal 29 Juli 2020 untuk aset di lokasi Kabupaten Purwakrata, Kabupaten Subang dan Kabupaten Bogor serta hasil Inventarisasi dan Penilaian untuk aset di lokasi Kec. Jonggol dan Kec. Cariu, Bogor dengan nomor laporan penilaian LAP-0469 s.d 0471/1/PRO-01/KNL.0803/01.00.00/2023 tanggal 8 November 2023. Aset ini telah dilakukan pemindahan status dan penetapan status penggunaan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KM.6/2024 tentang Pemindahan Status Penggunaan dan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tanggal 17 Januari 2024 dan dalam proses penyusunan dan koordinasi untuk Berita Acara Serah Terima kepada Kementerian Pertahanan.

No	Lokasi	Tanggal Perolehan	Tanggal Penilaian	Luas (m2)	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Wajar (Rp)
1	Kec. Kiarapedes, Kab. Purwakarta, Jawa Barat	2011	-	26.442	2.086.568.158	-
2	Kec. Jalan Cagak, Kab. Subang Jawa Barat	2011	-	11.474	994.313.892	-
3	Kec. Jonggol, Kab, Bogor, Jawa Barat	2006	6 Oktober 2023	136.830	-	9.624.137.594
4	Kec. Cariu, Kab. Bogor, Jawa Barat	2006	6 Oktober 2023	37.472	-	4.039.244.613

2. Aset eks Star Energy Sentosa (Sebatik) Ltd. yang dicatat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi Berupa Tanah yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Star Energy Sentosa (Sebatik) Ltd. pada Wilayah Kerja Sebatik dari Kementerian ESDM kepada Kementerian Keuangan Nomor 417.BA/BN.05/SJA.4/2023 dan Nomor BA-8/KN.4/2023 tanggal 8 Desember 2023.

No	Lokasi	Tanggal Perolehan	Tanggal Penilaian	Luas (m2)	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Wajar (Rp)
1	Desa Binusan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara	2009	-	52.503	715.400.205	210.012.000
2	Jl. Sinualing RT. 07, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan	2016	-	10.000	207.087.000	-

D.2.1.6.6.2. Aset KKKS Hulu Migas pada PPBMN

Aset Lainnya pada KKKS/Hulu Migas PBMN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp104.061.918.709 dan Rp5.725.853.761. Aset KKKS terdiri atas Tanah, Harta Benda Modal (HBM), Harta Benda Inventaris (HBI), dan Material Persediaan (MP). Barang yang termasuk dalam kategori tanah dan Material Persediaan tidak dilakukan penyusutan sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.05/2022. Penjelasan atas Aset KKKS sebagai berikut:

A. Aset Tanah

Saldo 1 Januari 2023	**-**
Mutasi Tambah	**737.324.914.058**
Alih Terima	737.324.914.058
Mutasi Kurang	**(737.324.914.058)**
Alih Serah	(737.324.914.058)
Saldo 31 Desember 2023	**-**

Penjelasan atas aset KKKS berupa aset tanah yang disajikan dalam Neraca adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal sebesar Rp0 merupakan Aset Tanah yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2022 (Audited);
2. Mutasi tambah sebesar Rp737.324.914.058 berasal dari:
   a. Penyerahan sebagian wilayah kerja (relinguish) sebesar Rp3.760.550.742 atas wilayah kerja Sepanjang dan Pagerungan Utara yang semula dimiliki oleh KKKS Kangean Energy Indonesia Ltd. kepada KESDM sesuai BAST nomor 289.BA/BN.05/SJA.4/2023 tanggal 17 Oktober 2023;
   b. Alih terima sebesar Rp733.564.363.316 karena penyerahan aset tanah dari KKKS Star Energy Sentosa kepada KESDM sesuai BAST nomor 295.BA/BN.05/SJA.4/2023 tanggal 17 Oktober 2023 sebesar Rp210.012.000 dan dari KKKS JOB Pertamina-Petrochina East Java kepada KESDM sebesar Rp733.354.351.316 sesuai BAST nomor 287.BA/BN.05/SJA.4/2023 17 Oktober 2023.
3. Mutasi Kurang tanah sebesar Rp737.324.914.058 berasal dari:

a. Penyerahan sebagian wilayah kerja (relinguish) sebesar Rp3.760.550.742 atas wilayah kerja Sepanjang dan Pagerungan Utara yang semula dimiliki oleh KKKS Kangean Energy Indonesia Ltd. dari KESDM kepada PT MGA Utama Energi sesuai SK Penggunaan nomor 1030.K/BN.03/SJN.A/2023;

b. Alih serah sebesar Rp733.564.363.316 karena penyerahan aset tanah dari KESDM kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp210.012.000 sesuai BAST nomor 417.BA/BN.05/SJA.4/2023 tanggal 17 Oktober 2023 dan dari KESDM kepada KKKS PHE Tuban East Java sebesar Rp733.354.351.316 sesuai BAST nomor 288.BA/BN.05/SJA.4/2023 tanggal 17 Oktober 2023. KKKS JOB Pertamina-Petrochina East Java terminasi pada tahun 2018 sehingga masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 89/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dimana ketentuan SK Penggunaan baru diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 140/PMK.06/2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi.

B. Aset Non Tanah

B.1. Aset Non Tanah Berubah HBM

Saldo 1 Januari 2023	**-**
Mutasi Tambah	**14.467.645.818**
Alih Terima	14.467.645.818
Mutasi Kurang	**(14.454.840.318)**
Alih Serah	(14.454.840.318)
Saldo 31 Desember 2023	**12.805.500**

Penjelasan atas mutasi Aset HBM adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal merupakan Aset HBM yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2022 (Audited);
2. Mutasi tambah HBM sebesar Rp14.467.645.818 berasal dari penyerahan aset HBM dari KKKS Husky Anugerah Limited kepada KESDM sesuai BAST nomor 291.BA/BN.05/SJA.4/2023 tanggal 17 Oktober 2023 sebesar Rp12.805.500 dan penyerahan relinguish sebagian wilayah kerja dari KKKS Kangean Energy Indonesia kepada KESDM sebesar Rp14.454.840.318 sesuai BAST nomor 012.BA/92/SJA.4/2019 dan BAC-0312/SKKMH3000/2019/S7 tanggal 6 Maret 2019.
3. Mutasi kurang HBM sebesar Rp14.454.840.318 berasal dari penyerahan relinguish sebagian aset HBM dari KESDM kepada KKKS PT MGA Energi Utama sebesar Rp14.454.840.318 sesuai SK Penggunaan nomor 1030.K/BN.03/SJN.A/2023.

B.2. Aset Non Tanah Berubah HBI

Saldo 1 Januari 2023	**22.869.948**
Mutasi Tambah	**6.213.606**
Alih Terima	6.213.606
Mutasi Kurang	**-**
Saldo 31 Desember 2023	**29.083.554**

Penjelasan atas mutasi Aset HBI adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal merupakan Aset HBI yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2022 (Audited);
2. Mutasi Tambah sebesar Rp6.213.606 berasal dari penyerahan aset HBI dari KKKS Husky Anugerah Limited kepada KESDM sesuai BAST nomor 291.BA/BN.05/SJA.4/2023 tanggal 17 Oktober 2023.

B.3. Aset Non Tanah Berupa Material Persediaan

	USD	Nilai Konversi Rupiah
Saldo Awal 1 Januari 2023	**362.531,55**	**5.702.983.813**
Mutasi Tambah	**6.747.536,95**	**104.020.029.655**
Alih Terima	6.747.536,95	104.020.029.655
Mutasi Kurang	362.531,55	5.588.786.375
Pemindahtanganan/Penjualan Lelang*	362.531,55	5.588.786.375
Jumlah Sebelum Penyesuaian Kurs	**6.747.536,95**	**104.134.227.093**
Penyesuaian Selisih Kurs 31 Desember 2023		(114.197.438)
Saldo Akhir 31 Desember 2023**	**6.747.536,95**	**104.020.029.655**

Ket : * menggunakan kurs tengah Transaksi BI pada 31 Desember 2022 (Rp15.731/US$
** menggunakan kurs tengah Transaksi BI pada 31 Desember 2023 (Rp15.416/US$)

Penjelasan atas mutasi Aset Material Persediaan adalah sebagai berikut:

1. Saldo Awal aset material persediaan merupakan saldo material persediaan per 31 Desember 2022 (audited) sebesar USD362,531.55 atau setara Rp5.702.983.813 (kurs per 31 Desember 2022 adalah Rp15.731/USD).
2. Mutasi Tambah sebesar Rp104.020.029.655 berasal dari alih terima sebesar USD6,747,536.95 atau setara dengan Rp104.020.029.655 karena penyerahan dari:
   a. KKKS Talisman East Jabung B.V. kepada KESDM sebesar USD66,871.00 atau setara dengan Rp1.030.882.291 sesuai BAST nomor 292.BA/BN.05/SJA.4/2023 tanggal 17 Oktober 2023;
   b. KKKS Cue Kalimantan Pte. Ltd. kepada KESDM sebesar USD2,068,749.00 atau setara dengan Rp31.891.841.367 sesuai BAST nomor 293.BA/BN.05/SJA.4/2023 tanggal 17 Oktober 2023;
   c. KKKS Star Energy Sentosa kepada KESDM sebesar USD1,853,969.00 atau setara dengan Rp28.580.786.104 sesuai BAST nomor 295.BA/BN.05/SJA.4/2023 tanggal 17 Oktober 2023;
   d. KKKS Medco SES (dh. Ophir SES Indonesia Limited) kepada KESDM sebesar USD2,757,947.58 atau setara dengan Rp42.516.519.893 sesuai BAST nomor 294.BA/BN.05/SJA.4/2023 tanggal 17 Oktober 2023.

3. Mutasi Kurang sebesar USD362,531.55 ekuivalen dengan Rp5.588.786.375 penjualan melalui lelang aset MP yang berasal dari:
   a. PT PHE Metana Suban II sebesar USD83,807.89 atau setara dengan Rp1.291.982.432;
   b. PHE Metana Sumatera IV sebesar USD73,352.40 atau setara dengan Rp1.130.800.598;
   c. PHE Metana Suban I sebesar USD205,371.26 atau sebesar Rp3.166.003.345.
4. Saldo akhir material persediaan merupakan stok material persediaan KKKS per 31 Desember 2023 senilai USD6,747,537.00 yang jika dikonversikan dengan kurs tengah BI per 31 Desember 2023 yaitu setara dengan Rp104.020.029.655. Berkenaan dengan hal tersebut maka diperlukan penyesuaian kurang selisih kurs sebesar Rp114.197.438.

D.2.1.6.6.3. Aset KKKS Hulu Migas pada SKK Migas

Aset KKKS per 31 Desember 2023 sebesar Rp615.910.897.460.531. Aset KKKS terdiri atas Tanah, Harta Benda Modal (HBM), Harta Benda Inventaris (HBI), dan Material Persediaan (MP). Penjelasan atas Aset KKKS sebagai berikut:

A. Aset Tanah

SALDO 1 JAN 2023	**32.608.467.703.671**
MUTASI TAMBAH	**3.279.137.497.021**
PIS Tahun Sebelumnya	111.722.209.252
Koreksi Pencatatan	3.467.910.000
Koreksi Tambah Hasil IP	69.851.512.000
Alih Terima dari KKKS	2.356.980.963.711
Alih Terima dari Pengguna Barang	737.114.902.058
MUTASI KURANG	**3.117.245.503.894**
Koreksi Pencatatan	57.328.213.125
Alih Serah Pada KKKS	2.322.592.376.711
Alih Serah Pada Pengguna Barang	737.324.914.058
SALDO 31 DESEMBER 2023	**32.770.359.696.798**

Penjelasan atas aset tanah yang disajikan dalam Neraca adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal sebesar Rp32.608.467.703.671 merupakan saldo Laporan Keuangan BMN Hulu Migas UAKPA BUN TK Tahun 2022 audited.

2. Mutasi tambah sebesar Rp3.279.137.497.021 yang terdiri dari:

   a. Pengadaan Tanah pada KKKS Exxonmobil Cepu Ltd. sebesar Rp110.576.809.252 dan KKKS JOB Pertamina – Medco E&P Simenggaris sebesar Rp1.145.400.000 dengan tahun perolehan sebelum tahun 2023;

   b. Koreksi pencatatan sebesar Rp3.467.910.000 yang diakibatkan sertifikasi pada KKKS Energy Equity Epic (Sengkang) Pty. Ltd;

   c. Koreksi tambah ke Neraca/reklas ke Neraca yang disebabkan hasil inventarisasi dan Penilaian atau perubahan tanggal PIS tanah sebesar Rp69.851.512.000 pada KKKS:

No	KKKS	Nilai
1	Emp Korinci Baru Ltd.	16.983.000.000
2	PT Medco E&P Indonesia	1.174.415.000
3	PT Medco E&P Tarakan	2.536.490.000
4	PT Sele Raya Belida	2.821.818.000
5	PT Odira Energy Karang Agung	223.869.000
6	Jindi South Jambi B Co. Ltd	3.949.579.000
7	TIS Petroleum E&P Blora Pte. Ltd.	38.751.294.000
8	PT PHE Kalimantan A & Sangatta West CBM Inc.	3.411.047.000
	Total	**69.851.512.000**

d. Alih Terima sebesar Rp2.356.980.963.711 yang merupakan transaksi Penyerahan Tanah pada KKKS sehubungan dengan berakhirnya wilayah kerja Sanga Sanga.

e. Alih terima tanah dari Pengguna Barang sehubungan dengan berakhirnya Kontrak Kerja Sama sebesar Rp737.114.902.058 pada KKKS:

No	KKKS	Nilai
1	PT Pertamina Hulu Energi Tuban East Java	733.354.351.316
2	PT MGA Utama Energi	3.760.550.742
	Total	**737.114.902.058**

3. Mutasi Kurang sebesar Rp3.117.245.503.894 yang terdiri dari:
   a. Koreksi pencatatan sebesar Rp57.328.213.125 yang merupakan transaksi mutasi kurang sertipikasi luas dengan mengoreksi nilai perolehan pada KKKS:

No	KKKS	Nilai
1	Energy Equity Epic (Sengkang) Pty. Ltd.	3.467.910.000
2	JOB Pertamina - Medco E&P Simenggaris	150.000.000
3	Exxonmobil Cepu Ltd.	53.677.803.125
4	Montd'or Oil Tungkal Ltd.	32.500.000
	Total	**57.328.213.125**

   b. Alih Serah sebesar Rp2.322.592.376.711 yang merupakan transaksi penerimaan Tanah pada KKKS Virginia Indonesia Co. Llc. sehubungan dengan berakhirnya wilayah kerja Sanga Sanga.
   c. Alih Serah ke Pengguna Barang sebesar Rp737.324.914.058 yang merupakan transaksi penyerahan Tanah yang berasal dari KKKS Terminasi kepada Pengguna Barang sehubungan dengan berakhirnya Kontrak Kerja Sama pada KKKS:

No	KKKS	Nilai
1	Kangean Energy Indonesia Ltd	3.760.550.742
2	JOB Pertamina Petrochina East Java	733.354.351.316
3	Star Energy Sentosa Sebatik	210.012.000
	Total	**737.324.914.058**

B. Aset Non Tanah

B.1. Aset Non Tanah Berupa HBM

Saldo Awal 1 Januari 2023	**526.767.447.331.300**
Mutasi Tambah:	**31.820.025.043.324**
PIS	23.823.116.204.065
PIS Tahun Sebelumnya	6.072.673.153.374
Koreksi Tambah	1.892.267.319.250
Alih Terima	14.454.840.318
Transfer Masuk	1.317.619.868
Selisih Pembulatan	2.507.486
SE	16.193.398.963
Mutasi Kurang:	**2.903.762.117.955**
Penghapusan	173.526.278.817
Alih Serah	14.467.645.818
Transfer Keluar	1.317.619.868
Selisih Pembulatan	289.761
Koreksi Kurang	2.252.227.372.257
Dalam Proses Penghapusan	462.222.911.434
Saldo Akhir 31 Desember 2023	**555.683.710.256.669**

Penjelasan atas mutasi Aset HBM adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal sebesar Rp526.767.447.331.300 merupakan saldo Laporan Keuangan BMN Hulu Migas UAKPA BUN TK Tahun 2022 audited.
2. Mutasi tambah HBM sebesar Rp31.820.025.043.323 berasal dari:
    a. Pembelian HBM pada Tahun 2023 sebesar Rp23.823.116.204.065;
    b. Penambahan HBM baru dengan tahun perolehan sebelum Tahun 2023 yang baru dicatat pada tahun 2023 sebesar Rp6.072.673.153.374;
    c. Koreksi tambah nilai perolehan HBM sebesar Rp1.892.267.319.250, yang terdiri dari:
        - hasil IP HBM tahun 2023 pada 16 KKKS dengan nilai wajar sebesar Rp424.859.360.800;
        - koreksi sebesar Rp1.467.407.958.450 yang berasal dari late charges dan koreksi nilai AFE.
    d. Alih terima atas KKKS Terminasi sebesar Rp14.454.840.318;
    e. Transfer masuk antar KKKS sebesar Rp1.317.619.868;
    f. Selisih pembulatan sebesar Rp2.507.586;
    g. Subsequent Expenditure sebesar Rp16.193.398.963.

3. Mutasi kurang HBM sebesar Rp2.903.762.117.955 berasal dari:
   a. Penghapusan sebesar Rp173.526.278.817 merupakan penghapusan HBM berdasarkan surat hapus buku SKK Migas yang telah laku lelang;
   b. Alih serah atas KKKS Terminasi sebesar Rp14.467.645.818;
   c. Transfer Keluar sebesar Rp1.317.619.868;
   d. Selisih Pembulatan sebesar Rp289,761;
   e. Koreksi kurang nilai perolehan HBM yang antaa lain berasal dari koreksi nilai AFE sebesar Rp2.252.227.372.257;
   f. Terdapat HBM yang sudah laku lelang yang dijelaskan dalam risalah lelang namun belum diterbitkan surat keputusan penghapusan dan/atau surat hapus bukunya dan aset dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusan oleh SKK Migas kepada Menteri ESDM sebesar Rp462.222.911.434.

B.2. Aset Non Tanah Berupa HBI

Saldo Awal 1 Januari 2023	**127.121.059.832**
Mutasi Tambah:	**6.814.854.452**
Koreksi Saldo Awal	2
PIS/Pengadaan Tahun Berjalan	2.496.605.252
PIS/Pengadaan Tahun Sebelumnya	1.051.988.193
Koreksi Tambah	3.255.667.005
Alih Terima	10.594.000
Mutasi Kurang:	**1.825.141.223**
Penghapusan	101.664.394
Alih Serah	6.213.606
Koreksi Kurang	1.637.287.709
Dalam Proses Penghapusan	79.975.514
Saldo Akhir 31 Desember 2023	**132.110.773.061**

Penjelasan atas mutasi Aset HBI adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal sebesar Rp127.121.059.832 merupakan saldo Laporan Keuangan BMN Hulu Migas UAKPA BUN TK Tahun 2022 audited.
2. Mutasi tambah sebesar Rp6.814.854.452 berasal dari:
   a. Koreksi saldo awal HBI sebesar Rp2 pada KKKS PT Pertamina Hulu Energi Metan Tanjung II;
   b. Pembelian HBI pada Tahun 2023 sebesar Rp2.496.605.252 pada KKKS;
   c. Penambahan HBI baru dengan tahun perolehan sebelum Tahun 2023 yang baru dicatat pada tahun 2023 sebesar Rp1.051.988.193.
   d. Koreksi tambah nilai perolehan HBI sebesar Rp3.255.667.005 yang disebabkan:
      - hasil IP HBI tahun 2023 pada 16 KKKS dengan nilai wajar sebesar Rp623.540.948;
      - koreksi sebesar Rp2.632.126.057 yang berasal dari late charges dan koreksi nilai AFE.

e. Alih terima dari KKKS terminasi sebesar Rp10.594.000.

3. Mutasi Kurang sebesar Rp1.825.141.223 berasal dari:
   a. Koreksi kurang nilai perolehan HBI yang antara lain berasal dari koreksi nilai AFE sebesar Rp1.637.287.709.
   b. Alih serah kepada KKKS alih Kelola sebesar Rp6.213.606;
   c. Penghapusan sebesar Rp101.664.394;
   d. Terdapat HBI yang sudah laku lelang yang dijelaskan dalam risalah lelang namun belum diterbitkan surat keputusan penghapusan dan/atau surat hapus bukunya dan aset dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusan oleh SKK Migas kepada Menteri ESDM sebesar Rp79.975.514.

B.3. Aset Non Tanah Berupa Material Persediaan

Deskripsi	USD	Nilai Konversi Rupiah
Saldo Awal 1 Januari 2023	**1.725.897.709**	**27.150.096.864.088**
Mutasi Tambah :	**1.166.102.471**	**17.982.292.312.727**
Penyesuaian Saldo Awal Tambah*	17.957.574	282.490.597.041
Pengadaan**	1.093.315.653	16.854.554.105.533
Pengembalian MP Non Cap**	22.812.573	351.678.618.250
Pengembalian MP Cap**	19.532.236	301.108.944.841
Transfer Masuk**	12.484.435	192.460.047.062
Alih Kelola Terima**	-	-
Mutasi Kurang :	**1.119.509.473**	**17.272.640.030.631**
Penyesuaian Saldo Awal Kurang*	15.857.930	249.461.095.971
Pemakaian Capital**	456.487.026	7.037.203.989.926
Pemakaian Non Capital**	545.751.188	8.413.300.310.958
Transfer Keluar**	12.891.819	198.740.280.387
Penghapusan*	29.481.759	463.777.552.401
Alih Kelola Serah**	6.747.537	104.020.029.656
Pemanfaatan MP Alih Kelola oleh KKKS Alih Kelola C	19.927.838	307.207.555.698
Pemanfaatan MP Alih Kelola oleh KKKS Alih Kelola NC	25.072.972	386.524.930.799
Pemanfaatan MP Alih Kelola oleh KKKS Lain C	4.134.477	63.737.099.282
Pemanfaatan MP Alih Kelola oleh KKKS Lain NC	3.156.927	48.667.185.553
Jumlah Sebelum Penyesuaian Kurs	**1.772.490.707**	**27.859.749.146.184**
Penyesuaian Selisih Kurs 31 Desember 2023	-	(535.032.412.181)
Saldo Akhir 31 Desember 2023	**1.772.490.707**	**27.324.716.734.003**

Ket :

* menggunakan kurs tengah BI pada 31 Desember 2022 (Rp15.731/US$)

**menggunakan kurs tengah BI pada 31 Desember 2023 (Rp15.416/US$)

Penjelasan atas mutasi Aset Material Persediaan adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal sebesar USD1,725,897,709 atau setara dengan Rp27.150.096.864.088 merupakan saldo Laporan Keuangan BMN Hulu Migas UAKPA BUN TK Tahun 2022 audited.

2. Mutasi tambah sebesar USD1,166,102,470 atau setara dengan Rp 17.982.292.312.727 berasal dari:

   a. Koreksi tambah atas saldo awal sebesar USD17,957,574 atau setara dengan Rp282.490.597.041 terjadi pada 25 KKKS.

b. Pengadaan Material Persediaan sebesar USD1,093,315,653 atau setara dengan Rp16.854.554.105.533 terjadi pada 48 KKKS.

c. Pengembalian atas Material Persediaan Non Capital sebesar USD22,812,573 atau setara dengan Rp351.678.618.250 terjadi pada 21 KKKS.

d. Pengembalian atas Material Persediaan Capital sebesar USD19,532,236.00 atau setara dengan Rp301.108.944.841 terjadi pada 18 KKKS.

e. Transfer Masuk sebesar USD12,484,435 atau setara Rp192.460.047.062 terjadi pada 37 KKKS.

3. Mutasi kurang sebesar USD1,119,509,473 atau setara dengan Rp17.272.640.030.631 berasal dari :

a. Koreksi kurang saldo awal sebesar USD15,857,930 atau setara dengan Rp249.461.095.971 terjadi pada 31 KKKS.

b. Pemakaian atas Material Persediaan capital sebesar USD456,487,026 atau setara dengan Rp7.037.203.989.926 terjadi pada 61 KKKS.

c. Pemakaian atas Material Persediaan non-capital sebesar USD545,751,188 atau setara dengan Rp8.413.300.310.958 terjadi pada 64 KKKS.

d. Transfer Keluar sebesar USD12,891,819 atau setara dengan Rp198.740.280.387 terjadi pada 43 KKKS.

e. Penghapusan sebesar USD29,481,759 atau setara dengan Rp463.777.552.401 terjadi pada 16 KKKS.

f. Alih kelola serah sebesar USD6,747,537 atau setara dengan Rp104.020.029.656 terjadi pada 4 KKKS.

g. Pemanfaatan MP Alih Kelola oleh KKKS Alih Kelola sebesar USD45,000,810 atau setara dengan Rp693.732.486.497.

h. Pemanfaatan MP Alih Kelola oleh KKKS Lain sebesar USD7,291,404 atau setara dengan Rp112.404.284.835.

4. Saldo akhir material persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar USD1,772,490,707 yang jika dikonversikan menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2023 (Rp15.416/US$) setara dengan Rp27.324.716.734.003 menyebabkan terjadinya beban kerugian selisih kurs sebesar Rp535.032.412.181.

D.2.1.6.6.4. Aset KKKS Hulu Migas pada BPMA

Aset KKKS per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp14.331.042.210.113 dan Rp13.955.186.333.525. Aset KKKS terdiri atas Tanah, Harta Benda Modal (HBM), Harta Benda Inventaris (HBI), dan Material Persediaan (MP). Penjelasan atas Aset KKKS sebagai berikut:

A. Aset Tanah

Mutasi tanah meliputi:

(Dalam Rupiah)

Saldo Awal 1 Januari 2023	**220.784.320.793**
Mutasi Tambah:	**306.655.259.000**
Transfer Masuk saldo awal dari UAKPA-PB	306.655.259.000
Mutasi Kurang:	**-**
Saldo Akhir 31 Desember 2023	**527.439.579.793**

Penjelasan atas aset tanah yang disajikan dalam tabel adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal yang disajikan sebesar Rp220.784.320.793 merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2022 Audited.
2. Mutasi tambah sebesar Rp306.655.259.000 merupakan Koreksi berdasarkan IP pada KKKS Eks. Pertamina Hulu Energi NSB.
3. Saldo akhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp527.439.579.593.

B. Aset Non Tanah

B.1. Aset Non Tanah Berupa HBM

Saldo Awal 1 Januari 2023	**12.340.933.408.635**
Mutasi Tambah:	**86.265.680.260**
Transfer saldo Awal UAKPA-PB	-
Koreksi Saldo Awal	48.999.999
PIS Tahun Berjalan	1.970.286.700
PIS Tahun Sebelumnya	11.575.130.561
Koreksi Berdasarkan IP	72.671.263.000
Mutasi Kurang:	**-**
Saldo Akhir 31 Desember 2023	**12.427.199.088.895**

Penjelasan atas mutasi Aset HBM adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal yang disajikan sebesar Rp12.340.933.408.635 merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2022 Audited.
2. Mutasi tambah sebesar Rp86.265.680.260 adalah disebabkan sebagai berikut:
   a. Koreksi saldo awal pada Eks. KKKS Pertamina Hulu Energi NSB sebesar Rp48.999.999;
   b. PIS Tahun berjalan pada KKKS PT. Pema Global Energi sebesar Rp1.970.286.700;
   c. PIS Tahun Sebelumnya pada KKKS PT Medco E&P Malaka sebesar Rp10.656.445.493;
   d. PIS Tahun Sebelumnya pada KKKS PT Pema Global Energi sebesar Rp918.685.068;
   e. Koreksi berdasarkan IP Pada KKKS Triangle Pase Inc sebesar Rp72.664.811.000;
   f. Koreksi berdasarkan IP Pada KKKS PT Medco E& P Malaka sebesar Rp6.452.000.

B.2. Aset Non Tanah Berupa HBI

Saldo Awal 1 Januari 2023	**1.692.373.208**
Mutasi Tambah:	**203.427.479**
PIS Tahun Berjalan	126.473.879
PIS Tahun Sebelumnya	69.595.600
Koreksi Berdasarkan IP	7.358.000
Mutasi Kurang:	**-**
Saldo Akhir 31 Desember 2023	**1.895.800.687**

Penjelasan atas mutasi Aset HBI adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal yang disajikan sebesar Rp1.692.373.208 merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2022 Audited;
2. Mutasi tambah sebesar Rp203.427.479 disebabkan sebagai berikut:
   a. PIS Tahun berjalan pada KKKS PT. Pema Global Energi sebesar Rp126.473.879;
   b. PIS Tahun Sebelumnya pada KKKS Triangle Pase Inc sebesar Rp17.462.042;
   c. PIS Tahun Sebelumnya pada KKKS PT. Pema Global Energi sebesar Rp52.133.558;
   d. Koreksi berdasarkan IP Pada KKKS Triangle Pase Inc sebesar Rp4.407.000;
   e. Koreksi berdasarkan IP Pada KKKS PT Medco E& P Malaka sebesar Rp2.951.000.
3. Saldo akhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp1.895.800.687.

B.3. Aset Non Tanah Berupa Material Persediaan

	USD	Nilai konversi rupiah
Saldo Awal 31 Desember 2022	**88.473.474,72**	**1.391.776.230.889**
Mutasi Tambah:	**8.129.410,94**	**125.322.999.051**
Penyesuaian Saldo Awal Tambah*	-	-
Pengadaan**	7.852.681,42	121.056.936.771
Pengembalian *Non Capital***	73.414,37	1.131.755.928
Transfer Masuk**	203.315,1	3.134.306.352
Transfer dengan Pembayaran ke Kas Negara**	-	-
Mutasi Kurang:	**7.441.771,19**	**114.722.344.665**
Pemakaian *Capital***	1.006.777,05	15.520.475.003
Pemakaian *Non Capital***	6.343.589,24	97.792.771.724
Transfer Keluar *Non Capital***	91.404,90	1.409.097.938
Jumlah Sebelum Penyesuaian Kurs	**89.161.114,47**	**1.402.376.885.275**
Penyesuaian Selisih Kurs 31 Desember 2023		(27.869.144.537)
Saldo Akhir 31 Desember 2023	**89.161.114,47**	**1.374.507.740.738**

Ket : * menggunakan kurs tengah pada 31 Desember 2022 (Rp15.371/US$)
** menggunakan kurs tengah pada 31 Desember 2023 (Rp15.416/US$)

Penjelasan atas mutasi Aset Material Persediaan adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal aset material persediaan merupakan saldo material persediaan per 31 Desember 2022 (audited) sebesar USD88,473,474,72 atau setara Rp1.391.776.230.889 merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2022 Audited.

2. Mutasi tambah sebesar USD8.129.410,94 atau setara dengan Rp125.322.999.051 berasal dari :
   a. Pengadaan sebesar USD7.852.681,42 atau setara dengan 121.056.936.771 merupakan pengadaan pada KKKS Medco E&P Malaka;
   b. Pengembalian non-Capital sebesar USD73.414,37 atau setara dengan Rp1.131.755.928 merupakan pengembalian dari KKKS Medco E&P Malaka;
   c. Transfer Masuk sebesar USD203.315,15 atau setara dengan Rp3.134.306.352 yang merupakan transfer masuk dari KKKS Medco E&P Malaka.
3. Mutasi kurang sebesar USD7.441.771,19 atau setara dengan Rp114.722.344.665 berasal dari :
   a. Pemakaian Capital sebesar USD1.006.777,05 atau setara dengan Rp15.520.475.003 merupakan pemakaian Aset MP dari KKKS Medco E&P Malaka;
   b. Pemakaian non-capital sebesar USD6.343.589,24 atau setara dengan Rp97.792.771.724 merupakan pemakaian aset MP dari KKKS Medco E&P Malaka;
   c. Transfer Keluar Non-Capital sebesar USD91.404,90 atau setara dengan Rp1.409.097.938.
4. Saldo akhir material persediaan merupakan stok material persediaan KKKS berdasarkan laporan BPMA per 31 Desember 2023 senilai USD89.161.114,47 yang jika dikonversikan dengan kurs tengah BI per 31 Desember 2023 yaitu setara dengan Rp1.374.507.740.738. Berkenaan dengan hal tersebut maka diperlukan penyesuaian kurang selisih kurs sebesar Rp27.869.144.537.

D.2.1.6.6.5. Aset PKP2B

Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp2.941.049.250.958 dan Rp2.489.221.624.116. Penjelasan atas Aset PKP2B sebagai berikut.

NO	Aset PKP2B	Per 31 Desember 2023
1	Aset Tanah	393.622.957.292
2	Aset Non Tanah	2.547.426.293.666
	Saldo Akhir 31 Desember 2023	**2.941.049.250.958**

A. Penjelasan Aset Tanah

Saldo Awal 1 Januari 2023	**50.671.809.000**
Mutasi Tambah:	**347.633.633.787**
Penambahan BMN Tanah	347.633.633.787
Mutasi Kurang:	(4.682.485.495)
Koreksi Kurang	(4.682.485.495)
Saldo Akhir 31 Desember 2023	**393.622.957.292**

1. Saldo awal merupakan aset tanah yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2022 sebesar Rp50.671.809.000 pada PT Berau Coal.
2. Terdapat mutasi tambah pada aset tanah dikarenakan hal sebagai berikut:
   a. Koreksi pencatatan dari Kategori BMN Non Tanah menjadi BMN Tanah pada PT Berau Coal sebesar Rp22.570.399.133 karena setelah dilakukan verifikasi dokumen dan inventarisasi, BMN tersebut termasuk kategori tanah sesuai Berita Acara Koreksi Nilai Pencatatan BMN Berupa Tanah PT Berau Coal Nomor 113/SDB.K-BA/IX/2023.
   b. Koreksi pencatatan dari off balance menjadi BMN Tanah pada PT Berau Coal sebesar Rp21.098.500.654 karena setelah dilakukan verifikasi dokumen dan inventarisasi, BMN tersebut termasuk kategori tanah dengan tahun perolehan diatas tahun 2010 sesuai Berita Acara Koreksi Nilai Pencatatan BMN Berupa Tanah PT Berau Coal Nomor 113/SDB.K-BA/IX/2023.
   c. Penambahan BMN sebesar Rp303.964.734.000 sesuai Laporan Penilaian LAP-0157/1/PRO-01/KNL.1304/01.01.00/2023 tanggal 18 Desember 2023 s.d LAP-0502/1/PRO-01/KNL.1304/01.01.00/2023 tanggal 18 Desember 2023.
3. Terdapat mutasi kurang sebesar Rp4.682.485.495 pada aset tanah dikarenakan koreksi pencatatan BMN Tanah dikarenakan setelah dilakukan penelusuran oleh Direktorat Jenderal Minerba, PPBMN KESDM dan PT Berau Coal, terdapat biaya-biaya yang tidak terkait dengan pembebasan lahan pada PT Berau Coal sesuai Berita Acara Koreksi Nilai Pencatatan BMN Berupa Tanah PT Berau Coal Nomor 113/SDB.K-BA/IX/2023.
4. Nilai Aset tanah yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp393.622.957.292 yaitu aset tanah yang berasal dari PT Berau Coal.

B. Penjelasan Aset Non Tanah

Saldo Awal 1 Januari 2023	**2.438.549.815.116**
Mutasi Tambah:	**131.446.877.685**
Penambahan Aset Baru	131.446.877.685
Mutasi Kurang:	**22.570.399.135**
Koreksi Pencatatan BMN Non Tanah ke Tanah	22.570.399.135
Saldo Akhir 31 Desember 2023	**2.547.426.293.666**

Penjelasan atas aset yang disajikan dalam neraca adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal merupakan Aset NonTanah yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2022 sebesar Rp2.438.549.815.116 pada PT Berau Coal.
2. Mutasi tambah aset non tanah sebesar Rp131.446.877.685 dengan rincian sebagai berikut :
   a. Pembelian BMN Non Tanah pada PT Berau Coal sebesar Rp121.597.900.310.
   b. Kapitalisasi BMN Non Tanah pada PT Berau Coal sebesar Rp9.080.918.375.
   c. Penambahan BMN Non Tanah PT Berau Coal sebesar Rp768.059.000 sesuai Laporan Penilaian Nomor LAP-0156/1/PRO-01/KNL.1304/01.01.00/2023 18 Des 23 sebagai tindak lanjut dari KMK 573/2020 yaitu BMN dalam kondisi tidak ditemukan

menjadi ditemukan

3. Mutasi kurang aset non tanah pada PT Berau Coal yaitu berupa koreksi pencatatan aset dari BMN Non Tanah ke Tanah sebesar Rp22.570.399.135 sesuai Berita Acara Koreksi Nilai Pencatatan BMN Berupa Tanah PT Berau Coal Nomor 113/SDB.K-BA/IX/2023.
4. Saldo akhir 31 Desember 2023 aset non tanah PKP2B sebesar Rp2.547.426.293.666 yang berasal dari PT Berau Coal.

D.2.1.6.6.6. Aset Lainnya Eks BLBI

Jumlah aset Lainnya BLBI per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.355.953.839.630 sedangkan per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp10.279.524.386.452, atau terjadi kenaikan sebesar Rp76.429.453.178. Aset eks BPPN terdiri dari aset inventaris, aset properti eks BPPN, aset nostro, surat berharga eks BPPN dan aset saham eks BPPN. Rincian aset eks BPPN per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023	Mutasi	31 Desember 2022
1	Aset Inventaris	5.298.590.721	(367.713.951)	5.666.304.672
2	Aset Properti eks BPPN	3.579.892.681.042	242.922.513.918	3.336.970.167.124
3	Aset Nostro	3.505.077.848	(584.179.642)	4.089.257.490
4	Surat Berharga Eks BPPN	516.935.339.526	(5.059.240.362)	521.994.579.888
5	Aset Saham Eks BPPN	56.633.220.440	(1.650.786.092)	58.284.006.532
6	Aset Lain-lain	6.193.688.930.053	(158.831.140.693)	6.352.520.070.746
	Jumlah	**10.355.953.839.630**	**76.429.453.178**	**10.279.524.386.452**

1. Aset Inventaris Eks BPPN

Aset inventaris adalah aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Aset Eks Bank asal (Bank Beku Operasi (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) berupa aset Properti dan Non Properti. Aset Inventaris yang disajikan di Neraca per 31 Desember 2023 adalah sejumlah 10.238 unit dengan nilai sebesar Rp5.298.590.721 sedangkan 31 Desember 2022 adalah sejumlah 11.579 unit dengan nilai sebesar Rp5.666.304.672 sehingga terdapat penurunan nilai sebesar Rp367.713.951 yang yang disebabkan oleh:

a. Pengurangan sejumlah 1.298 aset dengan nilai Rp348.247.951 yang terletak di (1) Jalan Raya Darmo (Eks BUS) dan (2) Jalan Wijaya Kusuma, Surabaya (Eks Dharmala) karena laku terjual melalui lelang sesuai Risalah Lelang Nomor 16/45/2023 tanggal 4 Januari 2023.
b. Pengurangan sejumlah 43 aset dengan nilai Rp19.466.000 yang terletak di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian karena dihapuskan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-78/KN/2023 tanggal 2 Mei 2023.

Selain itu terdapat aset yang telah ditetapkan status penggunaannya, namun belum dilakukan serah terima aset, sehingga belum dilakukan pengurangan, yaitu:

a. Pengurangan sejumlah 76 (tujuh puluh enam) aset dengan nilai Rp32.452.700 yang terletak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 569/KN/2022 tanggal 21 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima No. BA-2/KN.4/2023 tanggal 3 Maret 2023.

b. Pengurangan sejumlah 15 (enam belas) aset dengan nilai Rp3.925.436 yang terletak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang I karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 569/KN/2022 tanggal 21 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima No. BA-3/KN.4/2023 tanggal 3 Maret 2023.

c. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp4.099.613 yang terletak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 569/KN/2022 tanggal 21 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima No. BA-1/KN.4/2023 tanggal 3 Maret 2023.

d. 75 unit aset dengan nilai Rp30.976.927 yang terletak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur, ditetapkan status penggunaannya sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 569/KN/2022 tanggal 21 Desember 2022.

e. 18 unit aset dengan nilai Rp33.700.000 yang terletak di Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan status penggunaannya sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 574/KN/2022 tanggal 23 Desember 2022.

f. 4 unit lukisan dengan nilai Rp8.613.000 ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 118/KN/2023 tanggal 7 Agustus 2023.

g. 8 unit lukisan dengan nilai Rp8.837.000 ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 165/KN/2023 tanggal 20 November 2023.

Rincian Aset Inventaris Eks BPPN terlampir pada lampiran LD13.

2. Aset Properti Eks BPPN

Aset Properti eks BPPN yang disajikan di Neraca adalah aset properti yang dalam pengelolaan oleh Pemerintah didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau covernote).

Jumlah aset properti eks BPPN per 31 Desember 2023 sejumlah 1.460 aset dengan nilai sebesar Rp3.579.892.681.042, sedangkan per 31 Desember 2022 sejumlah 1.480 aset dengan nilai sebesar Rp3.336.970.167.124.

Rincian mutasi aset properti eks BPPN adalah sebagai berikut:

No.	Kelompok Aset	Saldo Per 31 Desember 2023		Mutasi 2023		Saldo Per 31 Desember 2022	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
1	BJDA (Verifikasi2011)	904	1.935.898.414.136	(15)	743.109.620.918	919	1.192.788.793.218
2	TemuanBPK	364	879.302.478.869	(3)	41.694.293.000	367	837.608.185.869

No.	Kelompok Aset	Saldo Per 31 Desember 2023		Mutasi 2023		Saldo Per 31 Desember 2022	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
3	BJDA (Verifikasi2009)	62	224.200.145.000	(1)	(569.276.858.000)	63	793.477.003.000
4	Settlement	-	-	(1)	(12.126.872.000)	1	12.126.872.000
5	Apartemen Menara 7 Gading	-	-	-	-	-	-
	Sinar Bonana	42	139.208.400.000	-	-	42	139.208.400.000
6	Griya Potensa	2	295.000.000	-	-	2	295.000.000
7	*Covernote*	86	400.988.243.037	-	39.522.330.000	86	361.465.913.037
Jumlah		**1.460**	**3.579.892.681.042**	**(20)**	**242.922.513.918**	**1.480**	**3.336.970.167.124**

Terjadi perubahan terhadap jumlah dan nilai aset properti eks BPPN disebabkan oleh :

1. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp38.662.804.000 yang terletak di Jalan Cik Ditiro No. 20, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena diserahkelolakan ke Lembaga Manajemen Aset Negara sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 4/KN/2022 tanggal 22 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-1/KN.4/2023 tanggal 11 Januari 2023.
2. Koreksi nilai aset yang terletak di Jalan Pemuda Nomor 18, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp1.625.431.500 setelah dilakukan koreksi sesuai Berita Acara Pemutakhiran No. BA-3/LMAN/2023 tanggal 14 April 2023, nilainya menjadi Rp20.197.032.452.
3. Koreksi nilai aset yang terletak di Kampung Sirnagalih RT 03 RW 01, Desa Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp94.545.000 setelah dilakukan koreksi sesuai Berita Acara Pemutakhiran No. BA-3/LMAN/2023 tanggal 14 April 2023 nilainya menjadi Rp1.225.133.000.
4. Koreksi nilai aset yang terletak di Kampung Sirnagalih RT 03 RW 01, Desa Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp220.392.900 setelah dilakukan koreksi sesuai Berita Acara Pemutakhiran No. BA-3/LMAN/2023 tanggal 14 April 2023 nilainya menjadi menjadi Rp2.145.338.667.
5. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Taman Kebon Jeruk, Kelurahan Srengseng (dahulu Desa Meruya Udik), Kecamatan Kembangan (dahulu Kecamatan Kebon Jeruk), Jakarta Barat, DKI Jakarta. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp67.211.848.480, setelah dilakukan penilaian sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V No. LAP-0066/1/PRO-01/KNL.0705/01.01.00/2023 tanggal 17 Maret 2023 nilainya menjadi Rp602.227.045.000.
6. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Gembor Raya, Desa Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp9.193.433.800, setelah dilakukan penilaian sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II No. LAP-0066/1/PRO-01/KNL.0603/01.01.00/2023 tanggal 11 April 2023 nilainya menjadi Rp91.548.928.000.

7. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai sesuai proporsi luasan (72/4.364) sebesar Rp34.607.516 untuk aset yang terletak di Perumahan Graha Raya Blok GR. 19 No. 03, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (dahulu Kabupaten Tangerang), Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat), karena laku terjual melalui lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II sesuai RL No. 197/24/2023 tanggal 9 Maret 2023.
8. Perubahan nilai aset yang terletak di Perumahan Danau Bogor Raya Blok I.6/1, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp921.500.000, setelah dilakukan penilaian sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor No. LAP-00101/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2023 tanggal 7 Maret 2023 nilainya menjadi Rp4.310.433.000. Selanjutnya pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp4.310.433.000 karena ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 72/KN/2023 tanggal 28 Maret 2023 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-48/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.
9. Koreksi perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun (dahulu Kecamatan Medan Baru), Kota Medan, Sumatera Utara. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp7.622.900.000, sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan Nomor LAP-0401/1/PRO-01/KNL.0201/99.00.00/2022 tanggal 1 November 2022 nilainya menjadi Rp36.360.059.000. Selanjutnya pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp36.360.059.000 karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 91/KN/2023 tanggal 5 Juni 2023 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-53/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.
10. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp15.747.608.000 yang terletak di Jalan Kol. Ahmad Syam (Jalan Sinangling), Desa Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat karena ditetapkan status penggunaannya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 541/KN/2022 tanggal 4 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-44/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.
11. Perubahan nilai aset yang terletak di Ruko Segitiga Mas Kosambi Kav. B No. 18, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp2.525.000.000 menjadi Rp3.137.178.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung No. LAP-0097/1/PRO-01/KNL.0801/01.01.00/2023 tanggal 5 Mei 2023.
12. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Puri Anjasmoro, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp6.261.000.000 menjadi Rp71.635.123.000 sesuai laporan

penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang No. LAP-0119/1/PRO-01/KNL.0901/01.01.00/2023 tanggal 12 Juni 2023.

13. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp601.763.860.000 yang terletak di Desa Pakuon (dahulu Ds. Cikanyere), Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Hibah kepada Pemprov Jabar sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 550/KN/2022 tanggal 25 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-58/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.
14. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp12.126.872.000 yang terletak di Jalan Palang Merah No. 15 BC, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara karena ditetapkan status penggunaannya kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 516/KN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-54/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.
15. Aset yang terletak di Desa Neglasari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dilakukan pemecahan karena aset tidak terletak dalam satu hamparan. Luas awal 2.991.360 m2 dengan nilai Rp29.913.600.000 kemudian dipecah dengan nilai wajar dibagi secara proporsional (sesuai luas tanah) menjadi
    a. 03.01.02.00001369-A seluas 399.405 m2 dengan nilai Rp3.994.050.000. Terdapat perubahan nilai menjadi Rp58.771.810.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor Nomor LAP-0073/1/PRO-01/KNL.0803/01.00.00/2023. Selanjutnya ditetapkan status penggunannya ke Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 55/KN/2023 tanggal 17 Februari 2023 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-44/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023;
    b. 03.01.02.00001369-B seluas 300.000 m2 dengan nilai Rp3.000.000.000. Terdapat perubahan nilai menjadi Rp46.516.380.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor Nomor LAP-0148/1/PRO-01/KNL.0803/01.00.00/2023 tanggal 10 April 2023; dan
    c. 03.01.02.00001369-C seluas 2.291.955 m2 dengan nilai Rp22.919.550.000.
16. Koreksi perubahan nilai aset yang terletak di Blok Pasir Pogor, Desa Neglasari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp3.018.211.150 menjadi Rp18.324.254.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung No. LAP-0120/1/PRO-01/KNL.0801/01.01.00/2023 tanggal 27 Juni 2023 dan LAP-0121/1/PRO-01/KNL.0801/01.01.00/2023 tanggal 27 Juni 2023. Selanjutnya pengurangan nilai aset sejumlah Rp18.324.254.000 karena ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 120/KN/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-227/KN/2023 tanggal 22 September 2023.

17. Koreksi perubahan nilai aset yang terletak di Kompleks Ruko Kota Grogol Permai Blok A 5-6, Jalan Latumenten, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Pertamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp1.100.515.355 menjadi Rp4.580.857.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V No. LAP-0068/1/PRO-01/KNL.0705/01.01.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 dan LAP-0070/1/PRO-01/KNL.0705/01.01.00/2023 tanggal 20 Maret 2023.
18. Perubahan nilai aset yang terletak di Desa Sukadalem Kecamatan Kramat Watu (sekarang Kecamatan Waringin Kurung) Kabupaten Serang, Banten. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp46.067.767.000 menjadi Rp143.754.254.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang (27 laporan penilaian) sebagaimana disampaikan melalui ND-884/KNL.0601/2023 tanggal 10 November 2023.
19. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Sidodadi, Kelurarahan d.h. Desa Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kota Medan Sumatera Utara. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp265.508.000 menjadi Rp34.880.762.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan No. LAP-0314/1/PRO-01/KNL.0201/05.00.00/2023 tanggal 13 Oktober 2023.
20. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Cilandak KKO No.52, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp754.162.500 menjadi Rp10.799.498.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V No. LAP-0227/1/PRO-01/KNL.0705/01.01.00/2023 tanggal 24 Oktober 2023.
21. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Sultan Iskandar Muda RT 009 Rw 09 Nomor 11E (d.h. Jalan Arteri Pondok Pinang Pejompongan), Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp2.693.957.000 menjadi Rp14.005.658.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V No. LAP-0229/1/PRO-01/KNL.0705/01.01.00/2023 tanggal 24 Oktober 2023.
22. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan bukit Golf Hijau Kavling 159, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang (d.h. Kecamatan Citeureup), Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp2.904.720.000 menjadi Rp8.252.117.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor No. LAP-0453/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2023 tanggal 23 Oktober 2023.
23. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Bongkaran No. 10, Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp7.431.234.000 menjadi Rp23.259.138.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya No. LAP-0249/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2023 tanggal 8 November 2023.

Selain itu terdapat aset yang telah ditetapkan status penggunaannya, namun belum dilakukan serah terima aset, sehingga belum dilakukan pengurangan, yaitu:

1. 1 (satu) aset dengan nilai Rp4.580.857.000 yang terletak di Kompleks Ruko Kota Grogol Permai Blok A 5-6, Jalan Latumenten, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Pertamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, ditetapkan status penggunaannya pada Badan Intelijen Negara sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-129/KN/2023 tanggal 10 September 2023.
2. 1 (satu) aset dengan nilai Rp71.635.123.000 yang terletak di Jalan Puri Anjasmoro, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, ditetapkan status penggunaannya kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-169/KN/2023 tanggal 24 November 2023
3. 27 (dua puluh tujuh) aset dengan nilai Rp143.754.254.000 yang terletak di Desa Sukadalem Kecamatan Kramat Watu (sekarang Kecamatan Waringin Kurung) Kabupaten Serang, Banten, ditetapkan status penggunaannya kepada Kementerian Pertahanan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-186/KN/2023 tanggal 28 Desember 2023.

Aset properti eks BPPN yang dibukukan namun tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau covernote) per 31 Desember 2023 adalah sejumlah 706 aset, sedangkan per 31 Desember 2022 adalah sejumlah 708 aset. Terjadi perubahan terhadap jumlah aset properti eks BPPN yang dibukukan namun tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau covernote) yaitu:

1. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset yang terletak di Taman Malibu Indah, Komp. Malibu Blok B No. 77, Kelurahan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 53/KN/2023 tanggal 15 Februari 2023 dan Berita acara Serah Terima Nomor BA-48/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.
2. Koreksi pengurangan sejumlah 1 (satu) aset yang terletak di Komplek Majapahit Permai, Jalan Majapahit No. 18, 20, 22 Blok B/105, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat karena diserahkelolakan kepada LMAN sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 204/KN/2016 tanggal 9 Juni 2016 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-02/KN.5/2016.

Daftar Aset Properti Eks BPPN Non Asli Dokumen Kepemilikan

No	Uraian	Jumlah Unit
1	Dokumen *Copy*	260
2	Kepemilikan tidak ada	415
3	Tidak ada keterangan	31
	Jumlah	**706**

Selain itu, terdapat aset properti eks BPPN, baik sebagian maupun seluruh tanah dan/bangunan, yang disewa oleh pihak ketiga yaitu:

1. Tanah seluas 782 m² berikut bangunan di atasnya seluas 2.205 m² di Jalan Pemuda Nomor 18, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara disewakan dengan nilai Rp108.000.000 selama 3 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-389/MK.6/2016 tanggal 6 Desember 2016 sebagaimana direvisi dengan surat nomor S-42/MK.6/2017 tanggal 22 Februari 2017. Jangka waktu sewa 21 Februari 2017 s.d. 21 Februari 2020. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp350.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-84/MK.6/2020 tanggal 18 Februari 2020. Jangka waktu sewa 23 Februari 2020 s.d. 22 Februari 2025. Perhitungan 12 bulan Rp 70.000.000.
2. Tanah seluas 2.400 m² di Jalan Legian No. 188 (dh. Jalan Padma Utara), Keluarahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali disewakan dengan nilai Rp3.375.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-420/MK.6/2018 tanggal 12 September 2018. Jangka waktu sewa 12 Oktober 2018 s.d. 11 Oktober 2023. Perhitungan 12 bulan Rp675.000.000
3. Tanah seluas 4.641 m² di Jalan Industri Dusun II Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara disewakan dengan nilai Rp88.500.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-515/MK.6/2018 tanggal 19 November 2018. Jangka waktu sewa 10 Desember 2018 s.d. 9 Desember 2023. Perhitungan 11 bulan Rp16.225.000
4. Tanah seluas 17.654 m² di Jalan Industri Dusun II Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara disewakan dengan nilai Rp241.500.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-516/MK.6/2018 tanggal 19 November 2018. Jangka waktu sewa 10 Desember 2018 s.d. 9 Desember 2023. Perhitungan 11 bulan Rp44.275.000
5. Tanah seluas 518 m² di Jalan Sambu No.3 RT.03 RW.03, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat disewakan dengan nilai Rp13.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-113/MK.6/2019 tanggal 19 Februari 2019. Jangka waktu sewa 1 Maret 2019 s.d. 29 Februari 2024. Perhitungan 12 bulan Rp2.600.000
6. Tanah seluas 69 m² di Jalan Merbabu No. 7, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara disewakan dengan nilai Rp62.895.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-287/MK.6/2019 tanggal 24 April 2019. Jangka waktu sewa 1 Juli 2019 s.d. 30 Juni 2024. Perhitungan 12 bulan Rp12.579.000
7. Tanah seluas 50 m² berikut bangunan di atasnya seluas 150 m² di Jalan Medan - Binjai, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara disewakan dengan nilai Rp44.100.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-927/MK.6/2019 tanggal 23 Desember 2019. Jangka waktu sewa 13 Maret 2020 s.d. 12 Maret 2025. Perhitungan 12 bulan R8.820.000
8. Tanah seluas 12.000 m² di Jalan Industri, Dusun II, Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara disewakan dengan

nilai Rp186.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-31/MK.6/2020 tanggal 27 Januari 2020. Jangka waktu sewa 13 Maret 2020 s.d. 12 Maret 2025. Perhitungan 12 bulan Rp37.200.000

9. Sebagian tanah seluas 42.940 m² di Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur disewakan dengan nilai Rp222.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-189/MK.6/2020 tanggal 29 April 2020. Jangka waktu sewa 30 Juni 2020 s.d. 29 Juni 2025. Perhitungan 12 bulan Rp44.400.000
10. Tanah seluas 2.093 m² berikut bangunan di atasnya seluas 210 m² di Kp. Sirnagalih Rt. 03 / 01, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Villa Kuala Deli) disewakan dengan nilai Rp108.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-10/MK.6/WKN.08/2020 tanggal 29 Desember 2020. Jangka waktu sewa 7 Januari 2021 s.d. 7 Januari 2026. Perhitungan 12 bulan Rp21.600.000.
11. Tanah seluas 412 m² berikut bangunan di atasnya seluas 377 m² di Jalan Urip Sumoharjo No. 55 B Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan disewakan dengan nilai Rp726.570.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-1/MK.6/WKN.15/2022 tanggal 21 Februari 2022. Jangka waktu sewa 20 Mei 2022 s.d. 19 Mei 2027. Perhitungan 12 bulan Rp145.314.000.

Rincian Jumlah dan Nilai Aset Properti Eks BPPN per 31 Desember 2023 tersaji dalam lampiran LD14.

3. Aset Nostro

Aset Nostro per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.505.077.848 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.089.257.490. Rincian mutasi aset nostro per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

	Saldo Akhir	Mutasi	Saldo Awal	Ket.
Aset Nostro di Bank Ganesha	3.505.077.848	(584.179.642)	4.089.257.490	
Total	**3.505.077.848**	**(584.179.642)**	**4.089.257.490**	

Aset Nostro yang tidak didukung dengan dokumen kepemilikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp454.445.361.290, dokumen kepemilikan tersebut masih dalam penelusuran oleh DJKN. Sehingga dalam hal aset nostro tersebut telah memenuhi syarat pengakuan aset, aset nostro tersebut akan disajikan di Neraca.

Rincian aset Nostro terlampir pada lampiran LD15.

4. Surat Berharga Eks BPPN

Surat berharga eks BPPN merupakan surat berharga yang belum free and clear pada saat pembubaran BPPN. Surat Berharga Eks BPPN disimpan di Kustodi Citibank berdasarkan Custodial Agreement tanggal 20 Juli 1999 antara BPPN dan Citibank. Namun, setelah tugas-tugas BPPN diteruskan oleh Kementerian Keuangan belum dilakukan pembaharuan

Perjanjian Kustodi.

Nilai surat berharga eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Citibank per 31 Desember 2023 sebesar Rp516.935.339.526, sedangkan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp521.994.579.888 atau terjadi penurunan nilai Surat Berharga Eks BPPN sebesar Rp5.059.240.362 yang berasal dari selisih kurs.

Rincian surat berharga non saham eks BPPN terlampir pada lampiran LD16.

5. Aset Saham Eks BPPN

Aset Saham adalah aset yang berupa kepemilikan saham pada Perseroan yang sebagian besar aset saham berasal dari Asset settlement BTO dan BBKU. Saham eks BPPN terbagi atas aset saham pada kustodi Citibank dan aset saham yang dikelola langsung oleh DJKN. Nilai aset saham eks BPPN per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp56.633.220.440 sedangkan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp58.284.006.532 sehingga terjadi penurunan nilai aset saham eks BPPN sebesar Rp1.650.786.092 yang berasal dari fluktuasi nilai per lembar saham. Rincian mutasi aset saham eks BPPN adalah sebagai berikut:

No.	Nama Emiten	Nilai Per 31 Desember 2023	Mutasi	Nilai Per 31 Desember 2022
1	PT Apac Citra Centertex, Tbk (PT Asia Pacific Investama, Tbk) (MYTX)	1.928.238.000	192.823.800	1.735.414.200
2	PT Apac Citra Centertex, Tbk (PT Asia Pacific Investama, Tbk) (MYTX)	2.247.582.000	224.758.200	2.022.823.800
3	PT Citatah Tbk (CTTH)	135.653.100	(429.568.150)	565.221.250
4	PT Citatah Tbk (CTTH)	497.057.268	(1.574.014.682)	2.071.071.950
5	PT Gajah Tunggal, Tbk (GJTL)	207.000	95.000	112.000
6	PT Holcim Indonesia, Tbk (PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk) (SMCB)	18.693.482.500	(1.111.880.000)	19.805.362.500
7	PT Langgeng Makmur Industri, Tbk (LMPI)	6.427.011.222	(289.505.010)	6.716.516.232
8	PT Star Pacific, Tbk (dlh. PT Lippo E-Net) (LPLI)	23.400	(4.000)	27.400
9	PT Merck, Tbk. (MERK)	409.000	(66.000)	475.000
10	PT Prima Alloy Steel Universal, Tbk (PRAS)	242.500	(137.500)	380.000
11	PT Sreeya Sewu Indonesia (PT Sierad Produce, Tbk (SIPD))	1.870.893.375	(863.489.250)	2.734.382.625
12	PT Sucaco, Tbk (PT Supreme Cable Manufacturing, Tbk) (SCCO)	7.105.000	1.050.000	6.055.000
13	PT Sucaco, Tbk (PT Supreme Cable Manufacturing, Tbk) (SCCO)	3.532.200.000	522.000.000	3.010.200.000
14	PT Trias Sentosa, Tbk (TRST)	47.400	(26.100)	73.500
15	PT Kabelindo Murni, Tbk (KBLM)	18.728.483.200	1.677.177.600	17.051.305.600
JUMLAH		54.068.634.965	(1.650.786.092)	55.719.421.057

Rincian aset saham eks BPPN sebagaimana terlampir pada lampiran LD17.

6. Aset Lain-Lain Eks BPPN

Aset Lain-lain pada neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.193.688.930.053 sedangkan per 31 Desember 2022 adalah sebesar

Rp6.352.520.070.746. Terdapat penurunan nilai Aset Lain-Lain sebesar Rp158.831.140.693. Aset Lain-Lain adalah aset non lancar lainnya yang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Aset Properti eks PPA	5.035.495.899.789	5.181.855.506.388
2	Surat Berharga eks PPA	1.140.273.773.063	1.151.573.752.158
3	Saham Non Bank eks PPA	17.919.257.201	19.090.812.200
	Jumlah	**6.193.688.930.053**	**6.352.520.070.746**

a. Aset Lain-lain Eks BPPN - Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA

Aset Properti eks kelolaan PT PPA (Persero) yang disajikan di Neraca adalah aset properti yang dalam pengelolaan oleh Pemerintah didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau covernote).

Jumlah aset properti eks Kelolaan PT PPA (Persero) per 31 Desember 2023 sejumlah 1.382 aset dengan nilai sebesar Rp5.035.495.899.789, sedangkan per 31 Desember 2022 sejumlah 1.478 aset dengan nilai sebesar Rp5.181.855.506.388. Terjadi perubahan terhadap jumlah dan nilai aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero) yang disebabkan oleh:

1. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp8.166.323.000 yang terletak di Jalan Padat Karya, Kelurahan Srimulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, karena hibah ke Pemerintah Kota Palembang sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 392/KN/2022 tanggal 12 Agustus 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-60/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.
2. Pengurangan sejumlah 4 (empat) aset dengan nilai Rp19.588.018.000 yang terletak di Jalan H. Saidin, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, karena hibah ke Pemerintah Provinsi Banten sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 546/KN/2022 tanggal 15 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-59/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.
3. Koreksi nilai aset yang terletak di Jalan Parak Anau No. 22, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp949.592.902 setelah dikoreksi nilainya menjadi Rp904.968.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang No. LAP-0082/1/PRO-01/KNL.0301/01.01.00/2022 tanggal 22 Desember 2022. Selanjutnya pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp904.968.000 karena ditetapkan status penggunaannya kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 43/KN/2023 tanggal 26 Januari 2023 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-54/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.
4. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Betawi I, Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang (dh. Kecamatan Sako), Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp9.641.773.000 menjadi Rp9.974.169.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang Palembang No. LAP-0057/1/PRO-01/KNL.0402/01.01.00/2023 tanggal 22 Februari 2023. Selanjutnya pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp9.974.169.000 karena hibah ke Pemerintah Kota Palembang sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 74/KN/2023 tanggal 28 Maret 2023 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-60/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.

5. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Raya Cilegon-Serang km. 3 RT 01/RW 002, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp1.546.000.000 menjadi Rp99.258.932.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang No. LAP-0001/1/PRO-01/KNL.0601/01.01.00/2023 tanggal 3 Januari 2022. Selanjutnya pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp99.258.932.000 karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 90/KN/2023 tanggal 5 Juni 2023 tanggal 5 Juni 2023 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-57/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.

6. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp2.441.969.000 yang terletak di Jalan Kelapa Puan Timur VI, Blok NB-7/22, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta karena ditetapkan status penggunaannya kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 575/KN/2022 tanggal 26 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-54/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.

7. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp15.703.504.000 yang terletak di Jalan Sultan Abdurrahman No.142, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selayan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat karena ditetapkan status penggunaannya kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 593/KN/2023 tanggal 30 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-54/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.

8. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp509.016.000 yang terletak di Jalan Toba, Perumahan Vila Indah Permai Blok D4 No. 19, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat karena ditetapkan status penggunaannya kepada Badan Pusat Statistik sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 182/KN/2022 tanggal 28 April 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-50/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.

9. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp4.358.176.000 yang terletak di Jalan Sandi, Desa Cot Mamplam (dh. Desa Cot Girek Kandang), Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe (dh. Aceh Utara), Provinsi Aceh karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 274/KN/2022 tanggal 29 Juli 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-45/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.

10. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp2.729.801.000 yang terletak di Jalan Bakti No. 9, Kelurahan Tebing Tinggi Lama, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kejaksaan

Agung Republik Indonesia sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 366/KN/2022 tanggal 11 Agustus 2022 jo. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 93/KN/2023 tanggal 5 Juni 2023 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-45/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.

11. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp590.557.000 yang terletak di Desa Kertasari (dh. Desa Peneda Gandor), Kecamatan Labuhan Haji (dh. Kecamatan Selong), Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 445/KN/2022 tanggal 11 September 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-45/KN/2022 tanggal 6 Juni 2023.
12. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp17.772.213.000 yang terletak di Jalan Antara dan Jalan Tamin, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 447/KN/2022 tanggal 11 September 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-45/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.
13. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp11.072.688.000 yang terletak di Jalan Karya Baru RT/RW 09/03, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 545/KN/2022 tanggal 15 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-45/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.
14. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp235.885.000 yang terletak di Jalan H. Ramli Ridwan, Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 393/KN/2022 tanggal 12 Agustus 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-57/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.
15. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp10.887.253.000 yang terletak di Jalan Bukit Panggoi Atas, Perumahan Bukit Panggoi Indah, Desa Cot Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 393/KN/2022 tanggal 12 Agustus 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-57/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.
16. Pengurangan sejumlah 3 (tiga) aset dengan nilai Rp316.482.000 yang terletak di Jalan Bukit Panggoi Atas, Perumahan Bukit Panggoi Indah, Desa Cot Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 393/KN/2022 tanggal 12 Agustus 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-57/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.

17. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp2.251.344.000 yang terletak di Jalan Rel Kereta Api, Kelurahan Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 393/KN/2022 tanggal 12 Agustus 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-57/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.
18. Pengurangan sejumlah 5 (lima) aset dengan nilai Rp540.890.000 yang terletak di Jalan Bukit Panggoi Atas, Perumahan Bukit Panggoi Indah, Desa Cot Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 393/KN/2022 tanggal 12 Agustus 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-57/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.
19. Pengurangan sejumlah 2 (dua) aset dengan nilai Rp219.462.000 yang terletak di Jalan Bukit Panggoi Atas, Perumahan Bukit Panggoi Indah, Desa Cot Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 393/KN/2022 tanggal 12 Agustus 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-57/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.
20. Pengurangan sejumlah 2 (dua) aset dengan nilai Rp243.604.000 yang terletak di Jalan Cut Nyak Dhien, Perumahan Bukit Panggoi Indah, Desa Cot Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 393/KN/2022 tanggal 12 Agustus 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-57/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.
21. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp119.516.000 yang terletak di Perumahan Panggoi Indah, Desa Cot Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 393/KN/2022 tanggal 12 Agustus 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-57/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.
22. Pengurangan sejumlah 20 (dua puluh) aset dengan nilai Rp47.976.213.000 yang terletak di Jalan H. Kinan (dh. Jalan SMP 10), Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tanah seluas 43.325 m2 dengan nilai Rp42.316.923.000,- sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 183/KN/2022 tanggal 11 Mei 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-57/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023 serta PSP kepada Komisi Pemilihan Umum tanah seluas 7.000 m2 dengan nilai Rp5.659.290.000,- sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 184/KN/2022 tanggal 12 Mei 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-55/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.

23. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp18.860.989.000 yang terletak di Jalan Akses Bandara Tabing, RT/RW 07/05 (Jalan Padang Bukittinggi KM 18 No. 22), Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 19/KN/2022 tanggal 25 Januari 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-48/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.

24. Pengurangan sejumlah 3 (tiga) aset dengan nilai Rp22.726.055.000 yang terletak di Jalan Depok 56, Kelurahan Kembangsari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 557/KN/2022 tanggal 29 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-48/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.

25. Pengurangan sejumlah 3 (tiga) aset dengan nilai Rp1.262.592.000 yang terletak di Komplek Pertokoan Bukit Barisan Nomor 35, 36, dan 37, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau (d/h Kelurahan Dompak, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau). karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 556/KN/2022 tanggal 29 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-53/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.

26. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp21.271.703.000 yang terletak di Jalan Ir. Sutami, LB. 36 KT E, F, KT/5, 6, 7, 8, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Tanjung Krang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 489/KN/2021 tanggal 15 Desember 2021 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-51/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.

27. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp24.300.537.000 yang terletak di Jalan Sejahtera (d.h. Jalan Kober), Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat (d.h. Kecamatan Setu), Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. karena ditetapkan status penggunaannya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 478/KN/2021 tanggal 7 Desember 2021 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-52/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.

28. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp3.102.945.000 yang terletak di Jalan K.H. Noer Ali (d/h Kalimalang Raya), Desa Bintara Jaya dan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 170/KN/2022 tanggal 22 April 2022 jo Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 394/KN/2022 tanggal 12 Agustus 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-44/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.

29. Pengurangan sejumlah 6 (enam) aset dengan nilai Rp442.442.349.000 yang terletak di Jalan K.H. Noer Ali (d/h Kalimalang Raya), Desa Bintara Jaya dan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 170/KN/2022 tanggal 22 April 2022 jo Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 394/KN/2022 tanggal 12 Agustus 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-44/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.

30. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp3.581.336.000 yang terletak di Jalan K.H. Noer Ali (d/h Kalimalang Raya), Desa Bintara Jaya dan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 170/KN/2022 tanggal 22 April 2022 jo Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 394/KN/2022 tanggal 12 Agustus 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-44/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.

31. Pengurangan sebagian aset dengan nilai Rp14.974.984.000 yang terletak di Perumahan Taman Sasana Patra, Jalan Tegal Binangun, Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Sebrang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 198/KN/2022 tanggal 7 Juni 2022 jo. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 515/KN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-44/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.

32. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp44.623.472.000 yang terletak di Perumahan Taman Sasana Patra, Jalan Tegal Binangun, Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Sebrang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 198/KN/2022 tanggal 7 Juni 2022 jo. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 515/KN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-44/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.

33. Pengurangan sebagian aset dengan nilai Rp6.892.189.000 yang terletak di Perumahan Taman Sasana Patra, Jalan Tegal Binangun, Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Sebrang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 198/KN/2022 tanggal 7 Juni 2022 jo. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 515/KN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-44/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.

34. Perubahan nilai aset yang terletak di Tering Hill 1 Blok A No. 54, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi. Kepulauan Riau. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp1.396.633.796 menjadi Rp3.514.004.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam No. LAP-0017/1/PRO-05/KNL.0304/05.00.00/2023 tanggal 13 Februari 2023. Selanjutnya dilakukan

Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp3.514.004.000 karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 73/KN/2023 tanggal 28 Maret 2023 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-44/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.

35. Perubahan nilai aset yang terletak di Tering Hill 1 Blok A No. 55, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi. Kepulauan Riau. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp845.173.796 menjadi Rp2.103.693.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam No. LAP-0018/1/PRO-05/KNL.0304/05.00.00/2023 tanggal 13 Februari 2023. Selanjutnya dilakukan pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp2.103.693.000 karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 73/KN/2023 tanggal 28 Maret 2023 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-44/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.

36. Perubahan aset yang terletak di Tering Hill 1 Blok A No. 83, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi. Kepulauan Riau. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp1.651.872.876 menjadi Rp4.459.313.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam No. LAP-0019/1/PRO-05/KNL.0304/05.00.00/2023 tanggal 13 Februari 2023. Selanjutnya dilakukan pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp4.459.313.000 karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 73/KN/2023 tanggal 28 Maret 2023 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-44/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.

37. Perubahan nilai aset yang terletak di Tering Bay Resort 1 Blok A No. 2, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi. Kepulauan Riau. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp1.938.300.000 menjadi Rp5.024.351.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam No. LAP-0021/1/PRO-05/KNL.0304/05.00.00/2023 tanggal 13 Februari 2023. Selanjutnya dilakukan pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp5.024.351.000 karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 73/KN/2023 tanggal 28 Maret 2023 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-44/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.

38. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp351.070.000 yang terletak di Jalan Pos Nomor 17G, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Kota, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kepulauan Riau karena diserahkelolakan ke Lembaga Manajemen Aset Negara sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 4/KN/2022 tanggal 22 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-1/KN.4/2023 tanggal 11 Januari 2023.

39. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp351.070.000 yang terletak di Jalan Pos Nomor 17F, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Kota, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kepulauan Riau karena diserahkelolakan ke Lembaga Manajemen Aset Negara sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 4/KN/2022 tanggal 22

Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-1/KN.4/2023 tanggal 11 Januari 2023.

40. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp351.070.000 yang terletak di Jalan Pos Nomor 17E, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Kota, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kepulauan Riau karena diserahkelolakan ke Lembaga Manajemen Aset Negara sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 4/KN/2022 tanggal 22 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-1/KN.4/2023 tanggal 11 Januari 2023.
41. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp351.070.000 yang terletak di Jalan Pos Nomor 17D, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Kota, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kepulauan Riau karena diserahkelolakan ke Lembaga Manajemen Aset Negara sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 4/KN/2022 tanggal 22 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-1/KN.4/2023 tanggal 11 Januari 2023.
42. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp351.070.000 yang terletak di Jalan Pos Nomor 17C, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Kota, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kepulauan Riau karena diserahkelolakan ke Lembaga Manajemen Aset Negara sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 4/KN/2022 tanggal 22 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-1/KN.4/2023 tanggal 11 Januari 2023.
43. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp351.070.000 yang terletak di Jalan Pos Nomor 17B, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Kota, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kepulauan Riau karena diserahkelolakan ke Lembaga Manajemen Aset Negara sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 4/KN/2022 tanggal 22 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-1/KN.4/2023 tanggal 11 Januari 2023.
44. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp351.070.000 yang terletak di Jalan Pos Nomor 17A, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Kota, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kepulauan Riau karena diserahkelolakan ke Lembaga Manajemen Aset Negara sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 4/KN/2022 tanggal 22 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-1/KN.4/2023 tanggal 11 Januari 2023.
45. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp195.297.787.000 yang terletak di Jalan Serang-Cilegon Km. 7, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten karena diserahkelolakan ke Lembaga Manajemen Aset Negara sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 82/KN/2023 tanggal 9 Mei 2023 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-5/KN.4/2023 tanggal 19 Mei 2023.
46. Koreksi nilai aset yang terletak di Jalan TGH Faisal Petak II, Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Aset sebelumnya

tercatat dengan nilai Rp48.759.000 menjadi Rp456.013.833 sesuai Berita Acara Pemutakhiran No. BA-3/LMAN/2023 tanggal 14 April 2023.

47. Koreksi nilai aset yang terletak di Jalan Kolonel Sugiyono No. 5 (dh. Jalan Damarwulan) RT 06/06, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp410.594.100 menjadi Rp11.071.242.474 sesuai Berita Acara Pemutakhiran No. BA-3/LMAN/2023 tanggal 14 April 2023.

48. Penambahan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp18.615.114.000 yang terletak di Jalan Majapahit No. 18, 20, dan 22, Blok B No. 4, 5, dan 6, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta yang ditarik kembali dari Lembaga Manajemen Aset Negara sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 86/KN/2023 tanggal 15 Mei 2023 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-5/LMAN/2023 tanggal 30 Mei 2023. Telah dilakukan pensertipikatan dari SHGB No. 1556/Petojo Selatan a.n. PT Bank Dharmala Nugraha menjadi SHP No. 292/Petojo Selatan a.n. Pemerintah RI c.q. Kementerian Keuangan. Selanjutnya terdapat perubahan nilai dari Rp647.728.020 menjadi Rp25.507.029.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III No. LAP-0068/1/PRO-01/KNL.0703/01.01.00/2023 tanggal 22 Juni 2023.

49. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta Km. 11, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp358.000.000 menjadi Rp1.196.041.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan No. LAP-0025/1/PRO-01/KNL.1301/05.00.00/2023 tanggal 6 Maret 2023.

50. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara, Desa Karangasih (d/h Waluja), Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp4.657.500.000 menjadi Rp33.261.111.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi No. LAP-0025/1/PRO-01/KNL.0802/01.01.00/2023 tanggal 10 Maret 2023.

51. Perubahan nilai aset yang terletak di Perumahan Taman Bumyagara, Komplek Bumi Rinjani Blok C-10 No. 1, RT/RW 01/21, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp290.600.000 menjadi Rp1.089.531.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi No. LAP-0045/1/PRO-01/KNL.0802/01.01.00/2023 tanggal 5 Juni 2023.

52. Perubahan nilai aset yang terletak di Griya Ciomas Asri, Desa Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp15.647.000.000 menjadi Rp87.584.147.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor No. LAP-0200/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2023 tanggal 23 Mei 2023.

53. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda, Kampung Rawa Sepat, Desa Jomin Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Aset

sebelumnya tercatat dengan nilai Rp6.403.080.000 menjadi Rp33.730.906.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta No. LAP-0039/1/PRO-01/KNL.0804/05.00.00/2022 tanggal 29 Mei 2023. Selanjutnya pengurangan sejumlah 4 (empat) aset dengan nilai Rp33.730.906.000, karena ditetapkan status penggunaannya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 112/KN/2023 tanggal 20 Juli 2023 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-234/KN/2023 tanggal 23 November 2023.

54. Perubahan nilai aset yang terletak di Perumahan Taman Bumyagara, Komplek Bumi Rinjani Blok C-10 No. 13, RT/RW 01/21, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp281.700.000 menjadi Rp1.138.653.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi No. LAP-0091/1/PRO-01/KNL.0802/01.01.00/2023 tanggal 5 September 2023.

55. Perubahan nilai aset yang terletak di Perumahan Taman Bumyagara, Komplek Bumi Rinjani Blok C-10 No. 13, RT/RW 01/21, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp264.600.000 menjadi Rp1.007.978.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi No. LAP-0092/1/PRO-01/KNL.0802/01.01.00/2023 tanggal 5 September 2023.

56. Perubahan nilai aset yang terletak di Perumahan Taman Bumyagara, Komplek Bumi Rinjani Blok C-10 No. 13, RT/RW 01/21, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp355.680.000 menjadi Rp1.221.336.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi No. LAP-0092/1/PRO-01/KNL.0802/01.01.00/2023 tanggal 5 September 2023.

57. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp317.900.000 yang terletak di Jalan Walanda Maramis No. 117, Kelurahan Katinggolan, Kecamatan Tonando Timur, Kabupaten. Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara karena laku terjual melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado sesuai Risalah Lelang No. 480/76/2023 tanggal 22 September 2023.

58. Koreksi perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Kav. 1/Th-1 Nomor 6, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp50.500.000.000 menjadi Rp81.264.032.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III No. LAP-0039/1/PRO-01/KNL.0703/01.01.01/2023 tanggal 28 Maret 2023.

59. Koreksi perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Pantai Saba, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp44.012.500.000 menjadi Rp137.848.653.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III No. LAP-0039/1/PRO-01/KNL.0703/01.01.01/2023 tanggal 28 Maret 2023.

60. Pengurangan sejumlah 6 (enam) aset dengan nilai Rp1.917.670.000, yang terletak di Jalan Alexindo, Desa Langensari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat karena laku terjual melalui lelang sesuai Risalah Lelang Nomor 1866/32/2023 tanggal 4 Oktober 2023.

61. Perubahan nilai aset yang terletak di Kompleks Perumahan Bangun Reksa Asri Blok CK, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Batu Ampar, Kec Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp814.000.000 menjadi Rp8.673.500.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan No. LAP-0024/1/PRO-01/KNL.1301/05.00.00/2023 tanggal 6 Maret 2023.

62. Perubahan nilai aset yang terletak di Komplek Gading Tutuka Jalan Raya Gading Boulevard Blok E1A-12 Desa Cingcin, Kecamatan Katapang (sekarang Kecamatan Soreang), Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp299.270.000 menjadi Rp645.275.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung No. LAP-0313/1/PRO-01/KNL.0801/01.05.00/2023 tanggal 04 Oktober 2023.

63. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Limo 1 RT 001 RW 01, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp11.339.575.000 menjadi Rp28.083.704.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III No. LAP-0120/1/PRO-01/KNL.07.03/01.01.01/2023 tanggal 16 Oktober 2023.

64. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Kali Baru Timur VI, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp11.259.600.000 menjadi Rp101.298.215.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III No. LAP-0119/1/PRO-01/KNL.0703/01.01.01/2023 tanggal 16 Oktober 2023.

65. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Plumpang Semper, Gang Walang Baru Dalam Blok V No. 3B, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp1.626.100.000 menjadi Rp26.131.909.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III No. LAP-0118/1/PRO-01/KNL.0703/01.01.01/2023 tanggal 16 Oktober 2023.

66. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Kampung Baru (d.h. Jalan Swadharma Raya), Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp3.400.000.000 menjadi Rp12.291.227.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III No. LAP-0121/1/PRO-01/KNL.07.03/01.01.01/2023 tanggal 16 Oktober 2023.

67. Perubahan nilai 15 (lima belas) aset yang terletak di Desa Sukamantri, Pasar Kemis, Tangerang, Banten. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp21.130.500.000 menjadi Rp76.296.827.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang Tangerang II No. LAP-0106/1/PRO-01/KNL.0603/01.01.00/2023 tanggal 9 November 2023.

68. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Sei Batang Serangan No. 19 D, Desa Sei Sikambing D, Medan Petisah (d.h. Medan Barat), Sumatera Utara. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp1.448.500.000 menjadi Rp3.551.142.064 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan No. LAP-0316/1/PRO-01/KNL.0201/05.00.00/2023 tanggal 14 November 2023.

69. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Swadaya RT 03 Lingkungan V, Kelurahan Kenten Talang Kelapa, Sumatera Selatan. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp351.500.000 menjadi Rp869.470.251 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang No. LAP-0264/1/PRO-01/KNL.0402/01.01.00/2023 tanggal 13 Oktober 2023.

70. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Swadaya RT 03 Lingkungan V, Kelurahan Kenten, Kecamatan Talang Kelapa Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp1.693.400.000 menjadi Rp4.678.405.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang No. LAP-0265/1/PRO-01/KNL.0402/01.01.00/2023 tanggal 13 Oktober 2023.

71. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Swadaya RT 03 Lingkungan V, Kelurahan Kenten Talang Kelapa, Sumatera Selatan. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp2.763.500.000 menjadi Rp6.860.762.749 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang No. LAP-0264/1/PRO-01/KNL.0402/01.01.00/2023 tanggal 13 Oktober 2023.

72. Perubahan nilai aset yang terletak di Desa Kedamaian dan Desa Campang Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Lampung. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp4.742.662.500 menjadi Rp122.682.504.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung No. LAP-0290/1/PRO-01/KNL.0502/01.01.00/2023 tanggal 11 Oktober 2023.

73. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Kampung Bebek Bumi Pangkalan Indah RT 02 RW 07, Desa Kedung Halang, Kecamatan Kedung Halang, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp1.325.000.000 menjadi Rp6.575.930.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor No. LAP-0454/1/PRO-01/KNL.0803/01.01.00/2023 tanggal 23 Oktober 2023.

74. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Mayjen Sungkono gang XIV B No. 57 RT/RW 006/02, Desa Radegansari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp3.975.500.000 menjadi Rp4.199.056.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya No. LAP-0245/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2023 tanggal 8 November 2023 dan LAP-0247/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2023 tanggal 8 November 2023.

75. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Kalijudan IX, Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp2.110.000.000 menjadi Rp26.424.723.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya No. LAP-0251/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2023 tanggal 8 November 2023.

76. Perubahan nilai 7 (tujuh) aset yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp20.908.800.000 menjadi Rp226.329.653.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar No. LAP-0160/1/PRO-06/KNL.1602/06.00.00/2023 tanggal 27 September 2023 dan LAP-0162/1/PRO-06/KNL.1602/06.00.00/2023 tanggal 27 September 2023 sebagaimana disampaikan dalam nota dinas Kepala KPKNL Makassar Nomor ND-827/KNL.1502/2023 tanggal 27 September 2023.

77. Pengurangan sejumlah 4 (empat) aset dengan nilai Rp4.457.498.000 yang terletak di Perumahan Taman Bumyagara, Komplek Bumi Rinjani Blok C-10 No. 1, RT/RW 01/21, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 143/KN/2023 tanggal 22 September 2023.

Selain itu terdapat aset yang telah ditetapkan status penggunaannya, namun belum dilakukan serah terima aset, sehingga belum dilakukan pengurangan, yaitu:

1. 1 (satu) aset dengan nilai Rp25.507.029.000 yang terletak di Jalan Majapahit No. 18, 20, dan 22, Blok B No. 4, 5, dan 6, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, ditetapkan status penggunaannya pada Badan Intelijen Negara sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 106/KN/2023 tanggal 18 Juli 2023.

2. 1 (satu) aset dengan nilai Rp1.196.041.000 yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta Km. 11, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Prvinsi Kalimantan Timur, ditetapkan status penggunaannya pada Badan Intelijen Negara sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 137/KN/2023 tanggal 10 September 2023.

3. 1 (satu) aset dengan nilai Rp81.264.032.000 yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Kav. 1/Th-1 Nomor 6, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, ditetapkan status penggunaannya pada Badan Intelijen Negara sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 134/KN/2023 tanggal 10 September 2023.

4. 1 (satu) aset dengan nilai Rp137.848.653.000 yang terletak di Jalan Pantai Saba, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 135/KN/2023 tanggal 10 September 2023.

5. 1 (satu) aset dengan nilai Rp1.038.294 yang terletak di Jalan Pantai Saba, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 135/KN/2023 tanggal 10 September 2023.
6. 1 (satu) aset dengan nilai Rp8.673.500.000 yang terletak di Kompleks Perumahan Bangun Reksa Asri Blok CK, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Batu Ampar, Kec Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur ditetapkan status penggunaannya pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-155/KN/2023 tanggal 30 Oktober 2023.
7. 1 (satu) aset dengan nilai Rp645.275.000 yang terletak di Komplek Gading Tutuka Jalan Raya Gading Boulevard Blok E1A-12 Desa Cingcin, Kecamatan Katapang (sekarang Kecamatan Soreang), Kabupaten Bandung, Jawa Barat ditetapkan status penggunaannya pada Badan Pusat Statistik sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-164/KN/2023 tanggal 20 November 2023.
8. 1 (satu) aset dengan nilai Rp28.083.704.000 yang terletak di Jalan Limo 1 RT 001 RW 01, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Pertahanan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-172/KN/2023 tanggal 1 Desember 2023.
9. 1 (satu) aset dengan nilai Rp101.298.215.000 yang terletak di Jalan Kali Baru Timur VI, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Pertahanan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-173/KN/2023 tanggal 1 Desember 2023.
10. 1 (satu) aset dengan nilai Rp26.131.909.000 yang terletak di Jalan Plumpang Semper, Gang Walang Baru Dalam Blok V No. 3B, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta, ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Pertahanan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-174/KN/2023 tanggal 1 Desember 2023.
11. 1 (satu) aset dengan nilai Rp12.291.227.000 yang terletak di Jalan Kampung Baru (d.h. Jalan Swadharma Raya), Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Pertahanan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-175/KN/2023 tanggal 1 Desember 2023.
12. 1 (satu) aset dengan nilai Rp231.400.000 yang terletak di Perumahan Citra Indah Cluster Telaga Bukit Menteng Blok A15/21 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Bogor, Jawa Barat, diserahkelolakan ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-183/KN/2023 tanggal 21 Desember 2023.
13. 1 (satu) aset dengan nilai Rp460.900.000 yang terletak di Perumahan Citra Indah Cluster Telaga Bukit Menteng Blok A15/22 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Bogor,

Jawa Barat, diserahkelolakan ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-183/KN/2023 tanggal 21 Desember 2023.

14. 2 (dua) aset dengan nilai Rp2.774.400.000 yang terletak di Komplek Ruko Cibening Permai, Jalan KH. Noer Ali (Kalimalang) No. 24 - 25, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat diserahkelolakan ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-183/KN/2023 tanggal 21 Desember 2023.
15. 2 (dua) aset dengan nilai Rp1.170.500.000 yang terletak di Perumahan Kemang Pratama Raya Blok MM No. 10 dan 11, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat diserahkelolakan ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-183/KN/2023 tanggal 21 Desember 2023.
16. 1 (satu) aset dengan nilai Rp202.903.3330 yang terletak di Ruko Niaga Jaya Jalan Proklamasi Blok C No. 26, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat diserahkelolakan ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-183/KN/2023 tanggal 21 Desember 2023.
17. 2 (dua) aset dengan nilai Rp444.000.000 yang terletak di Jalan Proklamasi Blok B No. 23-24, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat diserahkelolakan ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-183/KN/2023 tanggal 21 Desember 2023.
18. 1 (satu) aset dengan nilai Rp648.500.000 yang terletak di Condominium Golf Karawaci Fairway Tower, Jalan Jenderal Sudirman Boulevard 2890, Kelapa Dua, Curug diserahkelolakan ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-183/KN/2023 tanggal 21 Desember 2023.

Adapun aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero) yang dibukukan namun tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau covernote) per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 531 aset dengan nilai sebesar Rp1.680.193.044.443, sedangkan per 31 Desember 2022 adalah sebanyak 543 aset dengan nilai sebesar Rp1.702.047.726.443.

Daftar Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA (Persero) Non Asli Dokumen Kepemilikan

No	Uraian	Jumlah Unit	Nilai
1	Dokumen berupa AJB,APHT, Copy Dokumen Kepemilikan, PPJB, Risalah Lelang, IMB	531	Rp1.680.193.044.443

Terjadi perubahan terhadap jumlah dan nilai aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero) yang dibukukan namun tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau *covernote*) yang disebabkan oleh:

1. Perubahan nilai aset yang terletak di Taman Perkantoran Graha Famili Kav. 1, Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur menjadi Rp10.089.000.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya No. LAP-0081/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2023 tanggal 3 April 2023. Selanjutnya pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp10.089.000.000, karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 92/KN/2023 tanggal 5 Juni 2023 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-48/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.
2. Perubahan nilai aset yang terletak di Taman Perkantoran Graha Famili Kav. 2, Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur menjadi Rp9.105.750.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya No. LAP-0081/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2023 tanggal 3 April 2023. Selanjutnya pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp9.105.750.000 karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 92/KN/2023 tanggal 5 Juni 2023 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-48/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.
3. Perubahan nilai aset yang terletak di Taman Perkantoran Graha Famili Kav. 17, Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur menjadi Rp10.516.500.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya No. LAP-0081/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2023 tanggal 3 April 2023. Selanjutnya pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp10.516.500.000 karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 92/KN/2023 tanggal 5 Juni 2023 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-48/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.
4. Perubahan nilai aset yang terletak di Taman Perkantoran Graha Famili Kav. 16, Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur menjadi Rp9.105.750.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya No. LAP-0081/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2023 tanggal 3 April 2023. Selanjutnya pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp9.105.750.000 karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 92/KN/2023 tanggal 5 Juni 2023 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-48/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.
5. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp5.376.592.000 yang terletak di Jalan Fujiyama, Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur karena ditetapkan status penggunaannya kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 30/KN/2022 tanggal 7 Februari 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-54/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.

6. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp10.588.318.000 yang terletak di Jalan Pahlawan Nomor 1, Kelurahan Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur karena ditetapkan status penggunaannya kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 540/KN/2022 tanggal 4 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-54/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.
7. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp14.366.975.000 yang terletak di Jalan Kalibokor Selatan No. 150, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur karena ditetapkan status penggunaannya kepada Badan Intelijen Negara sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 202/KN/2022 tanggal 9 Juni 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-47/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.
8. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp9.633.538.000 yang terletak di Jalan Cendrawasih, Gg. Karet, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 555/KN/2022 tanggal 29 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-53/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.
9. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp1.766.210.000 yang terletak di Komplek Ruko Surya Inti Permata Blok A-18, Jalan Juanda Sedati, Desa Sedatiagung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 446/KN/2022 tanggal 11 September 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-56/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.
10. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp5.631.732.000 yang terletak di Jalan Kartini No. 26 - 28, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara (dh. Kecamatan Denpasar Barat), Kota Denpasar (dh. Kabupaten Badung), Provinsi Bali karena ditetapkan status penggunaannya kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 47/KN/2023 tanggal 31 Januari 2023 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-46/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.
11. Perubahan nilai aset yang terletak di Tering Bay Resort 1 Blok A No. 1, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi. Kepulauan Riau menjadi Rp1.095.730.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam No. LAP-0020/1/PRO-05/KNL.0304/05.00.00/2023 tanggal 13 Februari 2023. Selanjutnya pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp1.095.730.000 karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 73/KN/2023 tanggal 28 Maret 2023 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-44/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.
12. Perubahan nilai aset yang terletak di Tering Bay Resort 1 Blok A No. 3, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi. Kepulauan Riau menjadi

Rp831.870.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam No. LAP-0022/1/PRO-05/KNL.0304/05.00.00/2023 tanggal 13 Februari 2023. Selanjutnya pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp831.870.000 karena ditetapkan status penggunaannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 73/KN/2023 tanggal 28 Maret 2023 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-44/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.

13. Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp1.243.400.000 yang terletak di Kondominium Graha Family Prime A-302, Kelurahan Pradah Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur karena diserahkelolakan ke Lembaga Manajemen Aset Negara sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 4/KN/2022 tanggal 22 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-1/KN.4/2023 tanggal 11 Januari 2023.
14. Pengurangan sejumlah 2 (dua) aset dengan nilai Rp17.093.600.000 yang terletak di Jalan Ancol Barat III, Blok A5, No. 1-2, Kelurahan Ancol, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara (sekarang Jalan Ancol Barat VI, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta) karena diserahkelolakan ke Lembaga Manajemen Aset Negara sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 82/KN/2023 tanggal 9 Mei 2023 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-5/KN.4/2023 tanggal 19 Mei 2023.
15. Penambahan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp12.460.000.000 yang terletak di Jalan Panglima Polim No. 57, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta karena penarikan kembali dari Lembaga Manajemen Aset Negara sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2022 tanggal 22 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-2/LMAN/2023 tanggal 11 Januari 2023.
16. Penambahan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp4.511.000.000 yang terletak di Jalan K.H. Mas Mansyur No. 71 A, Tambora, Jakarta Barat, DKI Jakarta karena penarikan kembali dari Lembaga Manajemen Aset Negara sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2022 tanggal 22 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-2/LMAN/2023 tanggal 11 Januari 2023.
17. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Maskumambang No. 19, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat menjadi Rp4.296.899.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung No. LAP-0012/1/PRO-01/KNL.0801/01.01.00/2023 tanggal 11 Januari 2023.
18. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Daan Mogot Km. 10 No. 22 - A RT 001/RW 03, Kelurahan Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta menjadi Rp112.735.867.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III No. LAP-0061/1/PRO-01/KNL.07.03/01.01.00/2023 tanggal 25 Mei 2023.
19. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Sidokare Desa Sidokare, Kec. Sidoarjo, Sidoarjo - Jawa Timur (sekarang Jalan KH Mukmin) menjadi Rp1.038.294.000 sesuai

laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo No. LAP-0034/1/PRO-01/KNL.1002/01.01.00/2023 tanggal 15 Maret 2023.

20. Perubahan nilai aset yang terletak di Jalan Cangkorah – Leuwi Gajah Blok Cisepan Rt 05 RW 07, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Jawa Barat. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp14.400.000.000 menjadi Rp38.938.003.000 sesuai laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung No. LAP-0119/1/PRO-01/KNL.0801/01.01.00/2023 tanggal 27 Juni 2023. Selanjutnya koreksi penambahan jumlah dokumen dari sebelumnya 2 menjadi 3 dan koreksi nomor dokumen kepemilikan, karena terdapat 3 dokumen kepemilikan yaitu AJB No. 15/10-C/JB/I/1989, 16/11-C/JB/I/1989, dan 17/12-C/JB/I/1989.

Selain itu terdapat aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero) yang dibukukan namun tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau covernote), yang ditetapkan status penggunaannya namun belum belum dilakukan serah terima aset, sehingga belum dilakukan pengurangan, yaitu 1 (satu) aset dengan nilai Rp1.038.294.000 yang terletak di Jalan Sidokare Desa Sidokare, Kec. Sidoarjo, Sidoarjo - Jawa Timur (sekarang Jalan KH Mukmin), ditetapkan status penggunaannya pada Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 121/KN/2023 tanggal 14 Agustus 2023.

Selanjutnya, terdapat aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero), baik sebagian maupun seluruh tanah dan/bangunan, yang digunakan sementara oleh Kementerian Negara/Lembaga, dipinjam pakai oleh pemerintah daerah, serta disewa oleh pihak ketiga, yaitu:

1. Tanah seluas 95 m² berikut bangunan berupa ruko di atasnya seluas 285 m² di Ruko Mirah II No. 30, Komplek Panakukang Mas, Jalan Pangayoman No. 30, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan nilai Rp297.041.250 ditempati sementara oleh Kementerian Keuangan selama 5 tahun sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-224/MK.6/2018 tanggal 7 Juni 2018. Jangka waktu izin menempati sementara 24 Juli 2018 s.d. 23 Juli 2023.
2. 2 (dua) bidang tanah dengan luas total 217 m² beserta 1 (satu) unit bangunan seluas 637 m² di Jalan Urip Sumoharjo No. 169 (d.h. Jalan Gn. Bawakaraeng), Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai Rp4.651.000.000 ditempati sementara selama 5 tahun oleh Kementerian Keuangan sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-753/MK.6/2019 tanggal 24 Oktober 2019. Jangka waktu izin menempati sementara 4 November 2019 s.d. 3 November 2024.
3. Tanah seluas 955 m² berikut bangunan rumah di atasnya seluas 417 m² di Jalan Hasanuddin RT/RW 01/09, Kelurahan Pandang-Pandang (dahulu Kelurahan Katangka), Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan ditempati sementara oleh Kementerian Perhubungan selama 5 tahun sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-280/MK.6/2020 tanggal 7 Agustus 2020. Jangka waktu izin menempati sementara 15 September 2021 s.d. 14 September 2026.

4. Tanah seluas 400 m² berikut bangunan gedung di atasnya seluas 492 m² di Jalan Untung Suropati No. 14, Kelurahan Semara Pura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dengan nilai Rp1.641.500.000 dipinjam pakai oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung selama 5 tahun sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-159/MK.6/2020 tanggal 6 April 2020. Jangka waktu pinjam pakai 28 Mei 2020 s.d. 27 Mei 2025.
5. Tanah seluas 1.794 m² di Jalan Laksa R.E. Martadinata No.9, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan nilai Rp3.229.000.000 dipinjam pakai oleh Pemerintah Kota Balikpapan selama 5 tahun sesuai surat persetujuan nomor S-4/KN/2021 tanggal 8 Januari 2021. Jangka waktu pinjam pakai 26 Januari 2021 s.d. 25 Januari 2026.
6. Tanah seluas 93 m² di Jalan Ahmad Yani No.102 A, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara disewakan dengan nilai Rp125.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-389/MK.6/2016 tanggal 6 Desember 2016 sebagaimana direvisi dengan surat nomor S-42/MK.6/2017 tanggal 22 Februari 2017. Jangka waktu sewa 21 Februari 2017 s.d. 21 Februari 2022. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp129.755.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-3/MK.6/WKN.02/2022 tanggal 2 Juni 2022. Jangka waktu sewa 22 Februari 2022 s.d. 21 Februari 2027. Perhitungan 12 bulan Rp25.951.000.
7. Tanah seluas 712 m² berikut bangunan di atasnya seluas 239 m² di Jalan Bakti No. 72, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara disewakan dengan nilai Rp55.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-409/MK.6/2018 tanggal 7 September 2018. Jangka waktu sewa 1 Oktober 2018 s.d. 20 September 2023. Perhitungan 9 bulan Rp8.250.000.
8. Tanah seluas 2.680 m² berikut bangunan di atasnya seluas 117 m² di Jalan Kol. Sugiyono No. 5 (d/h Jalan Damarwulan) RT 06/05, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur disewakan dengan nilai Rp54.700.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-443/MK.6/2018 tanggal 1 Oktober 2018. Jangka waktu sewa 11 Oktober 2018 s.d. 11 Oktober 2019. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp271.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-819/MK.6/2019 tanggal 2 Desember 2019. Jangka waktu sewa 5 Desember 2019 s.d. 4 Desember 2024. Perhitungan 12 bulan Rp54.200.000.
9. Tanah seluas 86 m² berikut bangunan di atasnya seluas 150 m² di Jalan Jati Raya Blok E5, Kelurahan Srondol Wetan (dahulu Banyumanik), Kecamatan Banyumanik (dahulu Semarang Selatan), Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah disewakan dengan nilai Rp33.500.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-460/MK.6/2018 tanggal 5 Oktober 2018. Jangka waktu sewa 17 Desember 2018 s.d. 16 Desember 2019. Sewa diperpanjang setiap tahunnya, terakhir dengan dengan nilai Rp52.455.000 sesuai surat persetujuan sewa nomor S-18/MK.6/WKN.09/2022 tanggal 26 Oktober 2022. Jangka waktu sewa 17 Desember 2022 s.d. 16 Desember 2023. Perhitungan 12 bulan Rp52.455.000. Selanjutnya sewa diperpanjang selama 1 (satu) tahun sesuai surat

persetujuan sewa nomor S-22/MK.6/WKN.09/2023 tanggal 13 November 2023. Sudah dilakukan pembayaran dan belum perjanjian sewa.

10. Tanah seluas 100 m² berikut bangunan di atasnya seluas 300 m² di Jalan MT Haryono No. 218, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara disewakan dengan nilai Rp182.345.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-344/MK.6/2019 tanggal 15 Mei 2019. Jangka waktu sewa 6 Agustus 2019 s.d. 5 Agustus 2024. Perhitungan 12 bulan Rp36.469.000.
11. Tanah seluas 195 m² berikut bangunan di atasnya seluas 45 m² di Jalan Raya Gading Boulevard Blok F2-27 Desa Cingcin, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat disewakan dengan nilai Rp14.100.000 selama 3 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-353/MK.6/2019 tanggal 20 Mei 2019. Jangka waktu sewa 13 Juni 2019 s.d. 12 Juni 2022. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp23.128.000 selama 2 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-15/MK.6/WKN.08/2022 tanggal 17 Oktober 2022. Jangka waktu sewa 13 Juni 2022 s.d. 12 Juni 2024. Perhitungan 12 bulan Rp11.564.000.
12. Tanah seluas 341 m² berikut bangunan di atasnya seluas 128 m² di Komplek Villa Intan Permai Blok A No.1, Desa Cibadak, Kecamatan Sukaresmi (d.h Kecamatan Pacet), Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat disewakan dengan nilai Rp17.500.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-356/MK.6/2019 tanggal 20 Mei 2019. Jangka waktu sewa 2 Juli 2019 s.d. 1 Juli 2024. Perhitungan 12 bulan Rp3.500.000.
13. Tanah seluas 150 m² berikut bangunan di atasnya seluas 70 m² di Taman Permata Gadog Blok A6 No.3, Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cinajur, Provinsi Jawa Barat disewakan dengan nilai Rp15.000.000 selama 2 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-368/MK.6/2019 tanggal 27 Mei 2019. Jangka waktu sewa 24 Juni 2019 s.d. 23 Juni 2021. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp16.224.000 selama 2 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-14/MK.6/WKN.08/2021 tanggal 8 Juni 2021. Jangka waktu sewa 20 Agustus 2021 s.d. 19 Agustus 2023. Perhitungan 8 bulan Rp5.408.000.
14. Tanah seluas 9.810 m² berikut bangunan di atasnya seluas 584 m² di Jalan Ciburial No.15, RT.01 RW.05, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat disewakan dengan nilai Rp102.500.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-499/MK.6/2019 tanggal 22 Juli 2019. Jangka waktu sewa 6 Agustus 2019 s.d. 5 Agustus 2024. Perhitungan 12 bulan Rp20.500.000
15. Tanah seluas 242 m² berikut bangunan di atasnya seluas 275 m² di Villa Permata Bogor, Jalan Bangbarung Ujung No. 9, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat disewakan dengan nilai Rp15.500.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor KMK-184/MK.6/2019 tanggal 30 Juli 2019. Jangka waktu sewa 6 September 2019 s.d. 5 September 2020. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp98.380.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-7/MK.6/WKN.08/2021 tanggal 25 Maret 2021. Jangka waktu sewa 19 Mei 2021 s.d. 18 Mei 2026. Perhitungan 12 bulan Rp19.676.000.

16. Tanah seluas 1.900 m² di Jalan Komplek Industri Batik, Desa Jaga Baya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat disewakan dengan nilai Rp52.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-550/MK.6/2019 tanggal 12 Agustus 2019. Jangka waktu sewa 30 Agustus 2019 s.d. 29 Agustus 2024. Perhitungan 12 bulan Rp10.400.000.
17. Tanah seluas 2.083 m² di Jalan Komplek Industri Batik, Desa Jaga Baya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat disewakan dengan nilai Rp57.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-551/MK.6/2019 tanggal 12 Agustus 2019. Jangka waktu sewa 30 Agustus 2019 s.d. 29 Agustus 2024. Perhitungan 12 bulan Rp11.400.000.
18. Tanah seluas 1.900 m² di Jalan Komplek Industri Batik, Desa Jaga Baya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat disewakan dengan nilai Rp58.500.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-545/MK.6/2019 tanggal 12 Agustus 2019. Jangka waktu sewa 30 Agustus 2019 s.d. 29 Agustus 2024. Perhitungan 12 bulan Rp11.700.000.
19. Sebagian tanah seluas 915 m² berikut bangunan di atasnya seluas 705 m² di Jalan Hanjawar Pacet, Desa Cibodas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat disewakan dengan nilai Rp4.000.000 selama 2 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-573/MK.6/2019 tanggal 23 Agustus 2019. Jangka waktu sewa 10 September 2019 s.d. 9 September 2021. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp10.620.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-15/MK.6/WKN.08/2021 tanggal 30 Agustus 2021. Jangka waktu sewa 14 September 2021 s.d. 13 September 2026. Perhitungan 12 bulan Rp2.124.000.
20. Tanah seluas 19.337 m² di Gang Kuburan Cina, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat disewakan dengan nilai Rp17.500.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-630/MK.6/2019 tanggal 4 September 2019. Jangka waktu sewa 10 Oktober 2019 s.d. 9 Oktober 2024. Perhitungan 12 bulan Rp3.500.000.
21. Tanah seluas 7.205 m² di Perumahan Bogor Nirwana Residence, Jalan Graha Bogor Indah, Kelurahan Ranggamekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat disewakan dengan nilai Rp202.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor KMK-233/MK.6/2019 tanggal 9 September 2019. Jangka waktu sewa 30 Oktober 2019 s.d. 29 Oktober 2024. Perhitungan 12 bulan Rp40.400.000.
22. Tanah seluas 3.048 m² berikut bangunan di atasnya seluas 1.500 m² di Jalan Ancol Barat III Blok A5 Nomor 1-2, Kelurahan Ancol, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta disewakan dengan nilai Rp345.000.000 selama 3 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-651/MK.6/2019 tanggal 18 September 2019. Jangka waktu sewa 20 Januari 2020 s.d. 19 Januari 2023. Perhitungan 1 bulan Rp9.583.333,-.
23. Tanah seluas 49 m² berikut bangunan di atasnya seluas 99 m² di Jalan Irian Barat No. 35/37, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara disewakan dengan nilai Rp36.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan

sewa nomor S-928/MK.6/2019 tanggal 23 Desember 2019. Jangka waktu sewa 13 Maret 2020 s.d. 12 Maret 2025. Perhitungan 12 bulan Rp7.200.000.

24. Tanah seluas 410 m² berikut bangunan di atasnya seluas 365 m² di Jalan Roa Malaka Selatan Nomor 27, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta disewakan dengan nilai Rp375.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-36/MK.6/2020 tanggal 30 Januari 2020. Jangka waktu sewa 17 Februari 2020 s.d. 16 Februari 2025. Perhitungan 12 bulan Rp75.000.000.
25. Tanah seluas 73 m² berikut bangunan di atasnya seluas 146 m² di Jalan TGH Faisal Petak II, Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat disewakan dengan nilai Rp165.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-207/MK.6/2020 tanggal 5 Mei 2020. Jangka waktu sewa 29 Mei 2020 s.d. 28 Mei 2025. Perhitungan 12 bulan Rp33.000.000.
26. Tanah seluas 96 m² berikut bangunan di atasnya seluas 288 m² di Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok A.5, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp140.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-255/MK.6/2020 tanggal 2 Juli 2020. Jangka waktu sewa 26 Agustus 2020 s.d. 27 Agustus 2025. Perhitungan 12 bulan Rp28.000.000.
27. Sebagian tanah seluas 438 m² berikut bangunan di atasnya seluas 680 m² di Jalan Ahmad Yani No. 79, Kampung Cina, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat disewakan dengan nilai Rp108.204.000 selama 3 (tiga) tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-285/MK.6/2020 tanggal 14 Agustus 2020. Jangka waktu sewa 10 September 2020 s.d. 10 September 2023. Sewa diperpanjang dengan nilai Rp79.940.000 selama 2 (dua) tahun sesuai surat persetujuan sewa Nomor S-3/MK.6/WKN.03/2023 tanggal 7 September 2023. Jangka waktu sewa 11 September 2023 s.d. 10 September 2025. Perhitungan 12 bulan Rp37.368.667,-.
28. Tanah seluas 78 m² berikut bangunan di atasnya seluas 234 m² di Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok C7, Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp137.500.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-302/MK.6/2020 tanggal 28 Agustus 2020. Jangka waktu sewa 16 September 2020 s.d. 17 September 2025. Perhitungan 12 bulan Rp27.500.000.
29. Tanah seluas 78 m² berikut bangunan di atasnya seluas 234 m² di Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok E3, Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp62.500.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-303/MK.6/2020 tanggal 28 Agustus 2020. Jangka waktu sewa 18 September 2020 s.d. 19 September 2025. Perhitungan 12 bulan Rp12.500.000.
30. Tanah seluas 78 m² berikut bangunan di atasnya seluas 234 m² di Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok B19, Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp108.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-308/MK.6/2020 tanggal 10 September

2020. Jangka waktu sewa 1 Oktober 2020 s.d. 2 Oktober 2025. Perhitungan 12 bulan Rp21.600.000.

31. Sebagian tanah seluas 32 m² di Perumahan Taman Asri Blok F2 No. 8, RT 01/RW 06, Kelurahan Larangan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp4.229.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-18/MK.6/WKN.06/2021 tanggal 25 November 2021. Jangka waktu sewa 20 September 2021 s.d. 19 September 2022. Sewa diperpanjang dengan nilai Rp5.867.000 selama 1 (satu) tahun sesuai surat persetujuan sewa Nomor S-2/MK.06/WKN.06/2023 tanggal 13 Januari 2023. Jangka waktu sewa 25 Januari 2023 s.d. 24 Januari 2024. Perhitungan 11 bulan Rp5.378.083,33,-.
32. Tanah seluas 96 m² di Ruko Ciputat Mega Mall Blok F9/10, Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp150.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-316/MK.6/2020 tanggal 17 September 2020. Jangka waktu sewa 24 September 2020 s.d. 25 September 2025. Perhitungan 12 bulan Rp30.000.000.
33. Tanah seluas 78 m² berikut bangunan di atasnya seluas 234 m² di Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok C2, Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp120.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-348/MK.6/2020 tanggal 25 September 2020. Jangka waktu sewa 16 Oktober 2020 s.d. 17 Oktober 2025. Perhitungan 12 bulan Rp24.000.000.
34. Sebagian tanah seluas 58 m² di Perumahan Taman Asri Blok F2 No. 8 RT 01/RW 08, Kelurahan Larangan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp38.250.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-179/WKN.06/2020 tanggal 27 Oktober 2020. Jangka waktu sewa 12 November 2020 s.d. 11 November 2025. Perhitungan 12 bulan Rp7.650.000.
35. Sebagian tanah seluas 8 m² di Jalan Depok No.56, Kelurahan Kembangsari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah disewakan dengan nilai Rp200.200.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-368/MK.6/2020 tanggal 27 Oktober 2020. Jangka waktu sewa 26 Januari 2021 s.d. 25 Januari 2026. Perhitungan 12 bulan Rp40.040.000.
36. Tanah seluas 120 m² di Vila Japos E-2 No. 15, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp14.100.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-9/MK.6/WKN.06/2020 tanggal 13 November 2020. Jangka waktu sewa 7 Desember 2020 s.d. 6 Desember 2021. Sewa diperpanjang dengan nilai Rp14.459.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-19/MK.6/WKN.06/2021 tanggal 3 Desember 2021. Jangka waktu sewa 7 Desember 2021 s.d. 6 Desember 2022. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp15.759.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-1/MK.6/WKN.06/2023 tanggal 13 Januari 2023. Jangka waktu sewa 20 Januari 2023 s.d. 19 Januari 2024. Perhitungan 11 bulan Rp14.445.750.

37. Tanah seluas 19.630 m² di Blok Zein, Jalan Desa Wanantara, Desa Babadan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat disewakan dengan nilai Rp40.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-06/MK.6/WKN.08/2020 tanggal 18 November 2020. Jangka waktu sewa 18 Desember 2020 s.d. 17 Desember 2025. Perhitungan 12 bulan Rp8.000.000.

38. Tanah seluas 101 m² berikut bangunan di atasnya seluas 281 m² di Ruko Bona Indah Garden Blok A.2/D Kav. II, Plaza Bona Lebak Bulus, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta disewakan dengan nilai Rp345.000.000 selama 3 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-2/MK.6/WKN.07/2020 tanggal 22 November 2020. Jangka waktu sewa 21 Desember 2020 s.d. 20 Desember 2023. Perhitungan 12 bulan Rp115.000.000.

39. Tanah seluas 243 m² di Jalan Petogogan I, Gang IV/13, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta disewakan dengan nilai Rp6.438.450 selama 3 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-5/MK.6/WKN.07/2020 tanggal 8 Desember 2020 sebagaimana direvisi dengan surat nomor S-6/MK.6/WKN.07/2021 (Revisi S-5/MK.6/WKN.07/2020 tanggal 08 Desember 2020) tanggal 16 Februari 2021. Jangka waktu sewa 3 Maret 2021 s.d. 2 Maret 2024. Perhitungan 12 bulan Rp2 146 150.

40. Tanah seluas 120 m² berikut bangunan di atasnya seluas 60 m² di Perumahan Tiga Raksa Blok Al 31 No. 57, Desa Margasari, Kecamatan Tiga Raksa, Tangerang, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp3.000.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-1/MK.6/WKN.06/2021 tanggal 14 Januari 2021. Jangka waktu sewa 20 Januari 2021 s.d. 19 Januari 2022. Sewa diperpanjang dengan nilai Rp4.381.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-17/MK.6/WKN.06/2021 tanggal 24 November 2021. Jangka waktu sewa 20 Januari 2022 s.d. 19 Januari 2023. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp4.254.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-10/MK.6/WKN.06/2023 tanggal 14 Februari 2023. Jangka waktu sewa 19 Februari 2023 s.d. 18 Februari 2024. Perhitungan 12 bulan Rp3.964.622,-.

41. Tanah seluas 281 m² berikut bangunan di atasnya seluas 140 m² di Jalan Taman Singosari Ujung No.2A RT/RW 01/21, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat disewakan dengan nilai Rp18.900.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-6/MK.6/WKN.08/2021 tanggal 17 Februari 2021 dan dibayarkan secara bertahap (5 tahap). Tahap I dan II dengan total pembayaran sebesar Rp10.005.601 telah dilakukan masing-masing pada tanggal 11 Mei 2021 dan 18 Mei 2022. Tahap III sebesar Rp2.875.330 dilakukan paling lambat tanggal 11 Juni 2023, tahap IV sebesar Rp2.963.890 dilakukan paling lambat tanggal 11 Juni 2024, dan tahap V sebesar Rp3.055.179 dilakukan paling lambat tanggal 11 Juni 2025. Jangka waktu sewa 12 Juni 2021 s.d. 11 Juni 2026. Perhitungan 12 bulan Rp3.780.000.

42. Sebagian tanah seluas 16 m² di Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah disewakan dengan nilai Rp802.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-3/MK.6/WKN.09/2021 tanggal 22 Februari 2021. Jangka waktu sewa 10 Maret 2021 s.d. 9 Maret 2022. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp834.000 selama 1 tahun

sesuai surat persetujuan sewa nomor S-6/MK.6/WKN.09/2022 tanggal 26 Mei 2022. Jangka waktu sewa 10 Maret 2022 s.d. 9 Maret 2023. Perhitungan 2 bulan Rp139.000. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp1.021.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-17/MK.6/WKN.09/2023 tanggal 24 Oktober 2023. Sudah dibayar dan belum perjanjian sewa.

43. Sebagian tanah seluas 20 m² di Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah disewakan dengan nilai Rp896.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-4/MK.6/WKN.09/2021 tanggal 23 Februari 2021. Jangka waktu sewa 10 Maret 2021 s.d. 9 Maret 2022. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp904.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-10/MK.6/WKN.09/2022 tanggal 30 Mei 2022. Jangka waktu sewa 10 Maret 2022 s.d. 9 Maret 2023. Perhitungan 2 bulan Rp150.667,-. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp983.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-20/MK.6/WKN.09/2023 tanggal 24 Oktober 2023. Sudah dibayar dan belum perjanjian sewa.
44. Sebagian tanah seluas 20 m² di Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah disewakan dengan nilai Rp1.200.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-5/MK.6/WKN.09/2021 tanggal 23 Februari 2021. Jangka waktu sewa 10 Maret 2021 s.d. 9 Maret 2022. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp1.206.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-7/MK.6/WKN.09/2022 tanggal 26 Mei 2022. Jangka waktu sewa 10 Maret 2022 s.d. 9 Maret 2023. Perhitungan 2 bulan Rp201.000. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp1.392.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-18/MK.6/WKN.09/2023 tanggal 24 Oktober 2023. Sudah dibayar dan belum perjanjian sewa.
45. Sebagian tanah seluas 6 m² di Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah disewakan dengan nilai Rp314.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-6/MK.6/WKN.09/2021 tanggal 26 Februari 2021. Jangka waktu sewa 10 Maret 2021 s.d. 9 Maret 2022. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp271.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-8/MK.6/WKN.09/2022 tanggal 30 Mei 2022. Jangka waktu sewa 10 Maret 2022 s.d. 9 Maret 2023. Perhitungan 2 bulan Rp45.167,-. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp277.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-16/MK.6/WKN.09/2023 tanggal 24 Oktober 2023. Sudah dibayar dan belum perjanjian sewa.
46. Sebagian tanah seluas 30 m² di Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah disewakan dengan nilai Rp1.800.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-7/MK.6/WKN.09/2021 tanggal 26 Februari 2021. Jangka waktu sewa 10 Maret 2021 s.d. 9 Maret 2022. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp1.809.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-9/MK.6/WKN.09/2022 tanggal 30 Mei 2022. Jangka waktu sewa 10 Maret 2022 s.d. 9 Maret 2023. Perhitungan 2 bulan

Rp301.500. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp5.335.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-19/MK.6/WKN.09/2023 tanggal 24 Oktober 2023. Sudah dibayar dan belum perjanjian sewa.

47. Sebagian tanah seluas 6 m² di Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah disewakan dengan nilai Rp269.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-8/MK.6/WKN.09/2021 tanggal 26 Februari 2021. Jangka waktu sewa 10 Maret 2021 s.d. 9 Maret 2022. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp271.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-11/MK.6/WKN.09/2022 tanggal 30 Mei 2022. Jangka waktu sewa 10 Maret 2022 s.d. 9 Maret 2023. Perhitungan 2 bulan Rp45.167,-.
48. Tanah seluas 136 m² berikut bangunan di atasnya seluas 90 m² di Perumahan Banten Indah Blok B6 Nomor 483 RT/RW 078/11, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan disewakan dengan nilai Rp5.000.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-1/MK.6/WKN.04/2021 tanggal 2 Maret 2021. Jangka waktu sewa 12 Maret 2021 s.d. 11 Maret 2022. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp5.000.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-1/MK.6/WKN.04/2022 tanggal 22 Maret 2022. Jangka waktu sewa 7 April 2022 s.d. 6 April 2023. Sewa diperpanjang kembali selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-1/MK.6/WKN.04/2023 tanggal 16 Maret 2022. Jangka waktu sewa 7 April 2023 s.d. 6 April 2024. Perhitungan 12 bulan Rp5.011.250
49. Tanah seluas 78 m² berikut bangunan di atasnya seluas 234 m² di Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok B17, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp110.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-3/MK.6/WKN.06/2021 tanggal 30 Maret 2021. Jangka waktu sewa 7 April 2021 s.d. 6 April 2026. Perhitungan 12 bulan Rp22.000.000.
50. Tanah seluas 78 m² berikut bangunan di atasnya seluas 234 m² di Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok B18, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp110.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-4/MK.6/WKN.06/2021 tanggal 16 April 2021 dan dibayarkan secara bertahap (3 tahap). Tahap I sebesar Rp44.000.000 telah dibayarkan pada tanggal 19 April 2021. Tahap II sebesar Rp45.100.000 dilakukan paling lambat 20 Mei 2023 dan Tahap III sebesar Rp22.830.000 dilakukan paling lambat 20 Mei 2024. Jangka waktu sewa 19 April 2021 s.d. 18 April 2026. Perhitungan 12 bulan Rp22.000.000.
51. Tanah seluas 180 m² berikut bangunan di atasnya seluas 540 m² di Jalan Sudirman Nomor 121, Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau disewakan dengan nilai Rp360.000.000 selama 10 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-9/MK.6/WKN.03/2021 tanggal 3 Mei 2021 sebagaimana direvisi terakhir dengan surat nomor S-19/MK.6/WKN.03/2021 tanggal 30 November 2021 dan dibayarkan secara bertahap (3 tahap). Tahap I sebesar Rp90.000.000 dan Tahap II sebesar Rp93.000.000 telah dibayarkan masing-masing pada tanggal 30 Juli 2021 dan 24 Desember 2021. Tahap III sebesar Rp293.040.000 dilakukan paling lambat tanggal 1 Agustus 2023.

Jangka waktu sewa 2 Februari 2022 s.d. 1 Februari 2032. Perhitungan 12 bulan Rp54.300.000.

52. Tanah seluas 48 m² berikut bangunan di atasnya seluas 144 m² di Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok F 23, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp200.000.000 selama 10 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-7/MK.6/WKN.06/2021 tanggal 10 Mei 2021. Jangka waktu sewa 10 Mei 2021 s.d. 9 Mei 2031. Perhitungan 12 bulan Rp20.000.000.

53. Tanah seluas 48 m² berikut bangunan di atasnya seluas 144 m² di Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok F 25, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp210.000.000 selama 10 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-8/MK.6/WKN.06/2021 (Revisi S-6/MK.5/WKN.06/2021 tanggal 28 April 2021) tanggal 11 Mei 2021. Jangka waktu sewa 11 Mei 2021 s.d. 10 Mei 2031. Perhitungan 12 bulan Rp21.000.000.

54. Sebagian tanah seluas 12 m² di Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah disewakan dengan nilai Rp1.188.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-14/MK.6/WKN.09/2021 tanggal 25 Mei 2021. Jangka waktu sewa 14 Juni 2021 s.d. 13 Juni 2022. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp1.194.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-13/MK.6/WKN.09/2022 tanggal 27 Juni 2022. Jangka waktu sewa 14 Juni 2022 s.d. 13 Juni 2023. Perhitungan 5 bulan Rp497.500. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp295.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-21/MK.6/WKN.09/2023 tanggal 24 Oktober 2023. Sudah dibayar dan belum perjanjian sewa.

55. Sebagian tanah seluas 6 m² di Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah disewakan dengan nilai Rp308.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-15/MK.6/WKN.09/2021 tanggal 25 Mei 2021. Jangka waktu sewa 14 Juni 2021 s.d. 13 Juni 2022. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp305.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-12/MK.6/WKN.09/2022 tanggal 27 Juni 2022. Jangka waktu sewa 14 Juni 2022 s.d. 13 Juni 2023. Perhitungan 5 bulan Rp127.083,-. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp554.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-14/MK.6/WKN.09/2023 tanggal 24 Oktober 2023. Sudah dibayar dan belum perjanjian sewa.

56. Sebagian tanah seluas 650 m² berikut bangunan di atasnya seluas 400 m² di Jalan Sudirman Nomor 19, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat disewakan dengan nilai Rp74.195.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-14/MK.6/WKN.03/2021 tanggal 12 Juli 2021. Jangka waktu sewa 6 Agustus 2021 s.d. 6 Agustus 2022. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp244.275.000 selama 3 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-6/MK.6/WKN.03/2022 tanggal 29 Agustus 2022. Jangka waktu sewa 7 Agustus 2022 s.d. 6 Agustus 2025. Perhitungan 12 bulan Rp81.425.000.

57. Tanah seluas 8.540 m² di Jalan Pesantren Mulyojati RT 03/RW 03, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung disewakan dengan nilai Rp25.000.000 selama 10 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-135/WKN.05/2021 tanggal 14 Juli 2021. Jangka waktu sewa 29 Juli 2021 s.d. 28 Juli 2031. Perhitungan 12 bulan Rp2.500.000.

58. Sebagian tanah seluas 20 m² di Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah disewakan dengan nilai Rp1.212.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-18/MK.6/WKN.09/2021 tanggal 10 Agustus 2021. Jangka waktu sewa 31 Agustus 2021 s.d. 30 Agustus 2022. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp1.206.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-14/MK.6/WKN.09/2022 tanggal 28 Juni 2022. Jangka waktu sewa 31 Agustus 2022 s.d. 30 Agustus 2023. Perhitungan 8 bulan Rp804.000. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp6.751.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-18/MK.6/WKN.09/2023 tanggal 24 Oktober 2023. Sudah dibayar dan belum perjanjian sewa.

59. Sebagian tanah seluas 130 m² berikut bangunan di atasnya seluas 54 m² di Perumahan Bukit Nusa Indah, Jalan Pinang No. 1016, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp8.000.000 selama 2 (dua) tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-10/MK.6/WKN.06/2021 tanggal 23 Agustus 2021. Jangka waktu sewa 26 Agustus 2021 s.d. 25 Agustus 2023. Sewa diperpanjang dengan nilai Rp8.585.000 selama 2 (dua) tahun. Sudah dilakukan pembayaran dan sedang proses penandatanganan perjanjian sewa. Perhitungan 8 bulan Rp2.666.666,67. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp8.585.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-21/MK.6/WKN.09/2023. Sudah dibayar dan belum perjanjian sewa.

60. Sebagian tanah seluas 4 m² di Jalan Depok No.56, Kelurahan Kembangsari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah disewakan dengan nilai Rp91.685.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-19/MK.6/WKN.09/2021 tanggal 31 Agustus 2021 sebagaimana direvisi dengan surat nomor S-22/MK.6/WKN.09/2021 tanggal 14 Oktober 2021. Jangka waktu sewa 21 Oktober 2021 s.d. 20 Oktober 2026. Perhitungan 12 bulan Rp18.337.000.

61. Sebagian tanah seluas 727 m² di Jalan Sudirman Nomor 19, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat disewakan dengan nilai Rp81.625.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-17/MK.6/WKN.03/2021 tanggal 8 September 2021. Jangka waktu sewa 1 Desember 2021 s.d. 30 November 2026. Perhitungan 12 bulan Rp16.325.000.

62. Sebagian tanah seluas 64 m² di Jalan Raya Blega No.16, Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur disewakan dengan nilai Rp3.100.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-9/MK.6/WKN.10/2021 tanggal 24 September 2021. Jangka waktu sewa 1 Oktober 2021 s.d. 30 September 2022. Sewa diperpanjang kembali dengan nilai Rp7.900.000 selama 2 tahun sesuai surat persetujuan

sewa nomor S-33/MK.6/WKN.10/2022 tanggal 21 Oktober 2022. Jangka waktu sewa 1 November 2022 s.d. 30 September 2024. Perhitungan 12 bulan Rp3.950.000.

63. Sebagian tanah seluas 2.000 m² di Desa Sukamantri, Kecamatan Pasarkemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp13.200.000 selama 10 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-14/MK.6/WKN.06/2021 tanggal 18 Oktober 2021. Jangka waktu sewa 19 Oktober 2021 s.d. 18 Oktober 2031. Perhitungan 12 bulan Rp1.320.000.
64. Tanah seluas 15.000 m² di Jalan Raya Terbanggi Besar, Dusun VII Way Kekah RT/RW 01/01, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung disewakan dengan nilai Rp10.000.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-4/MK.6/WKN.05/2021 tanggal 22 Oktober 2021. Jangka waktu sewa 30 November 2021 s.d. 29 November 2026. Perhitungan 12 bulan Rp2.000.000.
65. Tanah seluas 167 m² berikut bangunan di atasnya seluas 328 m² di Jalan Imam Bonjol Blok A No. 10-11, Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau disewakan dengan nilai Rp481.568.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-1/MK.6/WKN.03/2022 tanggal 21 Januari 2022 dan dibayarkan secara bertahap (5 tahap). Tahap I sebesar Rp178.920.000 telah dilakukan pada tanggal 24 Januari 2022. Tahap II sebesar Rp75.662.000 dilakukan paling lambat tanggal 1 Juli 2023, Tahap III sebesar Rp75.662.000 dilakukan paling lambat tanggal 1 Juli 2024, Tahap IV sebesar Rp75.662.000 dilakukan paling lambat tanggal 1 Juli 2025, serta Tahap V sebesar Rp75.662.000 dilakukan paling lambat tanggal 1 Juli 2026. Jangka waktu sewa 1 Mei 2022 s.d. 30 April 2027. Perhitungan 12 bulan Rp96.313.600.
66. Tanah seluas 57 m² berikut bangunan di atasnya seluas 57 m² di Komplek Mustika Pura, Jalan Ir. H. Juanda No.137 Blok D12 dan D15, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat disewakan dengan nilai Rp142.500.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-6/MK.6/WKN.08/2022 tanggal 17 Mei 2022. Jangka waktu sewa 8 Agustus 2022 s.d. 7 Agustus 2027. Perhitungan 12 bulan Rp28.500.000.
67. Tanah seluas 88 m² berikut bangunan di atasnya seluas 144 m² di Jalan Imam Bonjol No. 64, Kelurahan Rambung Timur, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara disewakan dengan nilai Rp12.540.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-2/MK.6/WKN.02/2022 tanggal 2 Juni 2022. Jangka waktu sewa 10 Juni 2022 s.d. 9 Juni 2027. Perhitungan 12 bulan Rp2.508.000.
68. Sebagian tanah seluas 32 m² di Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah disewakan dengan nilai Rp1.930.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-15/MK.6/WKN.09/2022 tanggal 28 Juni 2022. Jangka waktu sewa 31 Agustus 2022 s.d. 30 Agustus 2023. Perhitungan 8 bulan Rp1.286.666,67.
69. Tanah seluas 120 m² berikut bangunan di atasnya seluas 45 m² di Perumahan Duta Garden Blok F15 No. 02, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp17.710.000 selama 1 tahun sesuai surat

persetujuan sewa nomor S-7/MK.6/WKN.06/2022 tanggal 14 Juli 2022. Jangka waktu sewa 3 Oktober 2022 s.d. 2 Oktober 2023. Sewa diperpanjangan dengan nilai Rp18.332.000 selama 1 (satu) tahun. Sudah dilakukan pembayaran dan sedang proses penandatanganan perjanjian sewa. Perhitungan 9 bulan Rp13.282.500. Sewa diperpanjang selama 1 tahun sesuai S-33/MK.6/WKN.06/2023. Sudah dibayar dan belum perjanjian sewa.

70. Tanah seluas 48 m² berikut bangunan di atasnya seluas 144 m² di Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok F 8, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp61.764.000 selama 3 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-10/MK.6/WKN.06/2022 tanggal 18 Juli 2022. Jangka waktu sewa 5 Agustus 2022 s.d. 4 Agustus 2025. Perhitungan 12 bulan Rp20.588.000.

71. Sebagian tanah seluas 44 m2 di Jalan Raya Mallengkeri, Lorong 3, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan disewakan dengan nilai Rp2.000.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-2/MK.6/WKN.15/2022 tanggal 22 Juli 2022. Jangka waktu sewa 7 Oktober 2022 s.d. 6 Oktober 2023. Sewa kembali diperpanjang selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-6/MK.6/WKN.15/2023 tanggal 4 Oktober 2023. Jangka waktu sewa 7 Oktober 2023 s.d. 6 Oktober 2024. Perhitungan 12 bulan Rp1.875.000.

72. Sebagian tanah seluas 12 m² di Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 02, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah disewakan dengan nilai Rp873.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-16/MK.6/WKN.09/2022 tanggal 11 Agustus 2022. Jangka waktu sewa 19 Agustus 2022 s.d. 18 Agustus 2023. Perhitungan 8 bulan Rp582.000.

73. Tanah seluas 373 m² di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 58 Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat disewakan dengan nilai Rp17.725.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-10/MK.6/WKN.08/2022 tanggal 15 Agustus 2022. Jangka waktu sewa 9 September 2022 s.d. 8 September 2023. Perhitungan 8 bulan Rp11.816.666,67.

74. Tanah seluas 423 m² di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 94 RT 02 RW 09, Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat disewakan dengan nilai Rp19.334.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-11/MK.6/WKN.08/2022 tanggal 19 Agustus 2022. Jangka waktu sewa 12 September 2022 s.d. 11 September 2023. Perhitungan 8 bulan Rp12.889.333,33.

75. Tanah seluas 307 m² berikut bangunan di atasnya seluas 433 m² di Jalan Trunojoyo No. 29, Desa Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur disewakan dengan nilai Rp132.343.000 selama 5 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-29/MK.6/WKN.10/2022 tanggal 24 Agustus 2022. Jangka waktu sewa 25 November 2022 s.d. 24 November 2027. Perhitungan 12 bulan Rp26.468.600.

76. Sebagian tanah seluas 172 m² di Jalan Sudirman Nomor 19, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat disewakan

dengan nilai Rp14.580.000 selama 1 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-12/MK.6/WKN.03/2022 tanggal 7 September 2022. Jangka waktu sewa 12 September 2022 s.d. 11 September 2023. Sewa diperpanjang dengan nilai Rp14.892.000 selama 1 (satu) tahun. Jangka waktu sewa 12 September 2023 s.d. 11 September 2024. Perhitungan 12 bulan Rp14.684.000.

77. Sebagian tanah seluas 140 m² berikut bangunan di atasnya seluas 80 m² di Komplek Gading Tutuka I Blok N3 No. 1, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat disewakan dengan nilai Rp13.650.000 selama 2 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-14/MK.6/WKN.08/2022 tanggal 13 Oktober 2022. Jangka waktu sewa 18 Oktober 2022 s.d. 17 Oktober 2024. Perhitungan 12 bulan Rp6.825.000.
78. Tanah seluas 35.000 m² di Desa Bengkulu Induk RT 01, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung disewakan dengan nilai Rp60.000.000 selama 2 tahun sesuai surat persetujuan sewa nomor S-6/MK.6/WKN.05/2022 tanggal 6 Desember 2022. Jangka waktu sewa 11 Januari 2023 s.d. 10 Januari 2025. Perhitungan 12 bulan Rp30.000.000.
79. Sebagian tanah seluas 29 m2 di Perumahan Taman Asri Blok F2 Nomor 8 RT 01 RW 08, Kelurahan Larangan, Kecamatan Cileduk, Kota Tangerang, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp5.278.000 selama 2 (dua) tahun sesuai surat persetujuan sewa Nomor S-3/MK.6/WKN.06/2023 tanggal 13 Januari 2023. Jangka waktu sewa 6 Maret 2023 s.d. 5 Maret 2025. Perhitungan 10 bulan Rp2.199.167,-.
80. Tanah seluas 48 m2 berikut bangunan di atas seluas 144 m2 di Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok F 22, Kelurahan Cipayung (dahulu Kelurahan Cempaka Putih), Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp41.716.000 selama 2 (dua) tahun sesuai surat persetujuan sewa Nomor S-5/MK.6/WKN.06/2023 tanggal 26 Januari 2023. Jangka waktu sewa 28 Maret 2023 s.d. 27 Maret 2025. Perhitungan 9 bulan Rp15.643.500,-.
81. Tanah seluas 96 m2 berikut bangunan di atas seluas 288 m2 di Jalan Insinyur Haji Juanda, Ciputat Mega Mall Blok F6 dan F7, Cemp. Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp76.582.000 selama 2 (dua) tahun sesuai surat persetujuan sewa Nomor S-9/MK.6/WKN.06/2023 tanggal 10 Februari 2023. Jangka waktu sewa 6 Maret 2023 s.d. 5 Maret 2025. Perhitungan 10 bulan Rp31.909.167,-.
82. Tanah seluas 96 m2 berikut bangunan di atas seluas 288 m2 di Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok F20 dan F21, Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp75.067.000 selama 2 (dua) tahun sesuai surat persetujuan sewa Nomor S-8/MK.6/WKN.06/2023 tanggal 9 Februari 2023. Jangka waktu sewa 27 Februari 2023 s.d. 26 Februari 2025. Perhitungan 10 bulan Rp31.277.917,-.
83. Tanah seluas 48 m² berikut bangunan di atasnya seluas 144 m² di Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok F 5, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten disewakan dengan nilai Rp41.716.000 selama 2 tahun sesuai

surat persetujuan sewa nomor S-17/MK.6/WKN.06/2022 tanggal 30 Desember 2022. Jangka waktu sewa 10 Januari 2023 s.d. 9 Januari 2025. Perhitungan 12 bulan Rp20.858.000.

84. Tanah seluas 896 m2 di Komp. Argapuri Kav. RG 07A, 11A, 20A, 20B, Desa Mekarsari, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung (Sekarang: RT/RW 02/02) disewakan dengan nilai Rp8.130 selama 10 (sepuluh) tahun sesuai surat persetujuan sewa Nomor S-7/MK.6/WKN.08/2023 tanggal 15 Maret 2023. Jangka waktu sewa 21 Maret 2023 s.d. 20 Maret 2033. Perhitungan 9 bulan Rp609.750-.
85. Tanah seluas 80 m2 berikut bangunan di atasnya seluas 140 m2 di Komplek Pertokoan Amlapura, Jalan Kesatrian, Desa Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali disewakan dengan nilai Rp18.245.000 selama 1 (satu) tahun sesuai surat persetujuan sewa Nomor S-1/MK.6/WKN.14/2023 tanggal 9 Mei 2023. Jangka waktu sewa 10 November 2022 s.d. 10 November 2023. Perhitungan 10 bulan Rp15.204.167,-.
86. Tanah seluas 650 m2 di Jalan Rondaan Blok Karyawangi, RT.01/RW.07, Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat disewakan dengan nilai Rp18.245.000 selama 3 (tiga) tahun dan 11 (sebelas) bulan sesuai surat persetujuan sewa Nomor S-11/MK.6/WKN.08/2023 tanggal 4 Juli 2023 (Revisi surat persetujuan sewa Nomor S-216/WKN.08/2023 tanggal 26 Mei 2023 jo. S-10/MK.6/WKN.08/2023 tanggal 3 Juli 2023). Jangka waktu sewa 27 Junii 2023 s.d. 26 Juni 2026. Perhitungan 6 bulan Rp 3.243.833.
87. Sebagian tanah seluas 48 m2 di Jalan Raya Mallengkeri, Lorong 3, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan disewakan dengan nilai Rp1.088.000 selama 1 (satu) tahun sesuai surat persetujuan sewa Nomor S-2/MK.6/WKN.15/2023 tanggal 11 Juli 2023. Perhitungan 6 bulan Rp544.000.

Rincian Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA terlampir pada lampiran LD18.

b. Surat Berharga Eks Kelolaan PT PPA

Surat berharga eks kelolaan PT PPA merupakan surat berharga yang telah free and clear pada saat pembubaran BPPN dan termasuk aset yang diserahkelolakan kepada PT PPA hingga berakhirnya masa perjanjian pengelolaan aset tahun 2009. Nilai surat berharga eks PT PPA per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.140.273.773.062 sedangkan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.151.573.752.158. Terdapat penurunan nilai surat berharga eks kelolaan PT PPA pada Tahun 2023 karena penyesuaian kurs senilai Rp11.299.979.096.

Rincian Surat Berharga Eks Kelolaan PT PPA terlampir pada lampiran LD19.

c. Saham Non Bank Eks PPA

Nilai aset saham (non bank) eks PT PPA per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp17.919.257.200 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp19.090.812.200 atau terjadi penurunan nilai saham sebesar Rp1.171.555.000. Penurunan nilai yang terjadi karena

fluktuasi nilai saham sebagai berikut:

No	Nama Emiten	Nilai Per 31 Desember 2023	Mutasi	Nilai Per 31 Desember 2022
1	PT Jembo Cable Company Tbk.	2.061.675.000	(1.171.555.000)	3.233.230.000
Jumlah		**2.061.675.000**	**(1.171.555.000)**	**3.233.230.000**

Saham eks kelolaan PT PPA merupakan saham telah free and clear pada saat pembubaran BPPN dan termasuk aset yang diserahkelolakan kepada PT PPA hingga berakhirnya masa perjanjian pengelolaan aset tahun 2009. Pengelolaan aset saham eks kelolaan PT PPA dilakukan sendiri oleh DJKN dengan berpedoman kepada PMK Nomor 154/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Aset Eks BPPN oleh Menteri Keuangan sebagaimana diubah melalui PMK Nomor 230/PMK.06/2022. Pengelolaan aset saham eks kelolaan PT PPA oleh DJKN meliputi menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS, permintaan pembayaran atas dividen saham atau hasil likuidasi, penjualan, penilaian, dan/atau penatausahaan.

Terdapat tindak lanjut transfer keluar aset saham PT Sejahtera Eka Graha senilai Rp26.563.266.134 ke Dit. KND (BA 999.03 Aset Investasi) sesuai Surat Perintah PRIN-25.1/KN/2020 dan Berita Acara Serah Terima tentang Pengelolaan Aset Saham Nomor BA-1/KN.2/2020 tanggal 23 Januari 2020. Rincian terlampir pada lampiran LD20.

D.2.1.6.6.7. Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T)

Pada tanggal 31 Desember 2023, aset lainnya pada Neraca ABMA/T dalam pengelolaan DJKN bernilai Rp37.267.219.100 yang berasal dari nilai saldo akhir aset lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp37.668.763.100 ditambah dengan penambahan nilai aset lainnya dari nilai wajar ABMA/T yang ditetapkan kompensasinya sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp5.018.322.000 dikurangi dengan penyelesaian ABMA/T yang terjadi hingga Tahun 2023 sebesar Rp5.419.866.000 yang ditandai dengan penerbitan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pelepasan ABMA/T atau dengan cara lain sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.06/2021 dan/atau ditetapkan kembali besaran kompensasinya sehingga menimbulkan kenaikan nilai dari aset terdahulu.

Adapun rincian nilai saldo awal Aset Lainnya Tahun 2023 yang merupakan nilai saldo akhir Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp37.668.763.100 berasal dari nilai wajar atas ABMA/T yang belum dapat dilunasi/diselesaikan sejak awal pengurusan pelepasan ABMA/T hingga 31 Desember 2022 disajikan pada lampiran LD21a.

Guna membentuk saldo akhir Aset Lainnya sampai dengan Tahun 2023, maka saldo awal Aset Lainnya tersebut selanjutnya ditambah dengan nilai wajar atas ABMA/T yang ditetapkan besaran kompensasinya hingga Tahun 2023 dan/atau ditetapkan kembali besaran kompensasinya sehingga menimbulkan kenaikan nilai dari aset terdahulu, dengan total nilai sebesar Rp5.018.322.000 disajikan pada lampiran LD21b.

Selanjutnya dikurangi dengan nilai wajar atas ABMA/T yang dilepaskan karena telah diterbitkan KMK pelepasannya, koreksi penetapan kembali besaran kompensasi ABMA/T, dengan total nilai sebesar Rp5.419.866.000 disajikan pada lampiran LD22.

Dengan demikian, total nilai aset hingga Tahun 2023 adalah sebesar Rp37.267.219.100 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu seratus rupiah).

D.2.1.6.6.8. Aset BMN Idle

Aset BMN idle per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp20.081.172.095 dan Rp32.894.062.705. BMN idle merupakan bagian dari BMN sehingga seluruh BMN eks BMN idle dapat diakui sebagai BMN, sedangkan BMN idle yang dilaporkan dan disajikan dalam Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus adalah BMN yang telah ditetapkan menjadi BMN idle dan sudah diserahkan kepada Pengelola Barang (dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang dalam hal ini Kepala KPKNL) atau disebut dengan BMN eks BMN Idle dan disajikan di dalam pos Aset Lainnya dengan perkiraan Aset Lain-Lain.

Pada Tahun 2023 terdapat mutasi atas BMN idle sebagai berikut:

Mutasi kurang:

Nilai mutasi kurang BMN eks BMN idle pada Tahun 2023 sebesar Rp915.668.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penetapan status penggunaan satu bidang Tanah Bangunan Rumah Negara dalam Proses Penggolongan dengan nilai perolehan sebesar Rp803.368.000 dan dua unit Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen dengan total nilai perolehan sebesar Rp25.600.000 serta dua unit Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen dengan total nilai perolehan sebesar Rp11.700.000 dari Kementerian Keuangan RI c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto kepada Mahkamah Agung c.q. Pengadilan Agama Kebumen.
2. Penghapusan 1 (satu) unit Bangunan Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen dengan nilai perolehan sebesar Rp75.000.000 pada KPKNL Banjarmasin.

Nilai mutasi kurang BMN eks BMN Idle pada Periode Tahun 2023 lebih rinci disajikan pada lampiran LD23.

Mutasi Tambah:

Nilai mutasi tambah BMN idle pada Tahun 2023 sebesar Rp17.147.631.390 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penetapan BMN idle atas satu bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I dengan nilai perolehan sebesar Rp1.616.472.000, dan tiga unit Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen dengan total nilai perolehan Rp743.639.000 dari Badan Pusat Statistik kepada Kementerian Keuangan RI c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan;
2. Penetapan BMN idle atas satu bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II dengan nilai perolehan sebesar Rp870.176.000 dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian Keuangan RI c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang;

3. Penetapan BMN idle atas satu bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I dengan nilai perolehan Rp732.068.000 dari Badan Pusat Statistik kepada Kementerian Keuangan RI c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung;
4. Penetapan BMN idle atas dua bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan total nilai perolehan sebesar Rp3.810.904.000 serta satu unit Bangunan Gudang Tertutup Permanen dengan nilai perolehan sebesar Rp7.000.000 dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian Keuangan RI c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang yang selanjutnya diserahterimakan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan;
5. Penetapan BMN idle atas tujuh bidang Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga dengan total nilai perolehan sebesar Rp1.691.491.000 beserta lima unit Gedung Pos Jaga Permanen dengan total nilai perolehan sebesar Rp86.090.793 dari Kementerian Keuangan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pamekasan;
6. Penetapan BMN idle berupa tiga bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan total nilai perolehan sebesar Rp193.532.000 dan satu bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II dengan nilai perolehan sebesar Rp400.000.000 serta satu unit Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai perolehan sebesar Rp106.707.000 dari Kementerian Keuangan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu.
7. Penetapan BMN Idle atas dua bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan total nilai perolehan sebesar Rp2.294.592.000, satu bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I dengan nilai perolehan sebesar Rp974.700.000, satu unit Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai perolehan sebesar Rp148.346.000, satu unit Pagar Permanen dengan nilai perolehan sebesar Rp56.592.000, satu unit Bangunan Gedung Kantor Lainnya dengan nilai perolehan sebesar Rp150.090.000, serta empat unit Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen dengan total nilai perolehan Rp197.372.000 dari Badan Pusat Statistik kepada Kementerian Keuangan RI c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam;
8. Penetapan BMN Idle atas dua bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan total nilai perolehan sebesar Rp95.023.000 dan satu unit Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen dengan nilai perolehan sebesar Rp20.918.023 dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian Keuangan RI c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung;
9. Penetapan BMN Idle atas satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan nilai perolehan Rp160.000.000 dan satu unit Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan total nilai perolehan sebesar Rp64.000.000 dari Mahkamah Agung kepada Kementerian Keuangan RI c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang;
10. Penetapan BMN Idle atas satu unit Bangunan Gedung Kantor Permanen, satu unit Bangunan Gedung Kantor Darurat, dua unit Rumah Negara Golongan II Tipe E Darurat dengan total nilai perolehan sebesar Rp2.219.051.574 dari Kementerian Keuangan c.q. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun;

11. Koreksi tambah pencatatan 3 (tiga) bidang Tanah BMN eks BMN Idle yang seharusnya dicatat di Tahun 2021 sesuai BAST BA-24/SJ.7/2021 dan BA-25/SJ.7/2021 sebesar Rp449.436.000;
12. Koreksi tambah pencatatan 1 (satu) bidang Tanah BMN eks BMN Idle yang seharusnya dicatat di Tahun 2022 sesuai BAST B-1460/02500/PL.800/12/2022 sebesar Rp59.431.000.

Nilai mutasi tambah BMN eks BMN Idle pada Periode Tahun 2023 lebih rinci disajikan pada lampiran LD24.

Reklasifikasi Aset Lainnya ke Properti Investasi

Pada tahun 2023 terdapat reklasifikasi Aset Lainnya ke Properti Investasi, berupa 44 (empat puluh empat) bidang tanah senilai Rp29.848.222.000.

Reklasifikasi Properti Investasi ke Aset Lainnya

Pada periode pelaporan per tanggal 31 Desember 2023, terdapat Aset Properti Investasi berupa satu bidang Tanah Bangunan Rumah Negara dalam Proses Penggolongan pada KPKNL Purwokerto dengan nilai perolehan sebesar Rp803.368.000 yang ditetapkan status penggunaan kepada Mahkamah Agung c.q. Pengadilan Agama Kebumen. Transaksi ini berdampak pada reklasifikasi Aset Properti dimaksud menjadi Aset lainnya.

Saldo Akhir:

Saldo BMN *Idle* yang telah diserahkan ke Pengelola Barang (sebelum penyusutan) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp20.081.172.095.

D.2.1.6.6.9. Aset Lain-lain dalam Pengelolaan TK DJKN

Nilai aset lain-lain per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp362.572.834.719. Nilai ini merupakan saldo akhir aset lain-lain dalam pengelolaan DJKN. Rincian nilai aset lain-lain per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Aset	Jumlah Aset	Nilai Aset (Rp)
1	Barang Gratifikasi	2.878	114.462.042.719
2	Aset Rampasan PT TLI	17.317 m2	248.110.792.000
Total			362.572.834.719

1. BARANG GRATIFIKASI

Nilai barang gratifikasi dalam pengelolaan DJKN per 01 Januari 2023 adalah Rp114.432.301.041. Nilai tersebut merupakan barang gratifikasi perolehan tahun 2015 hingga 2022 yang masih belum selesai proses pengelolaannya. Barang gratifikasi diakui sebagai aset lainnya dalam pengelolaan DJKN setelah diserahkan kepada DJKN. Aset lain-lain dicatat berdasarkan nilai perolehan. Apabila nilai perolehan dicatat dalam mata uang asing maka nilai pencatatan dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal penyerahan.

Selama Tahun 2023, KPK melakukan penyerahan barang gratifikasi sebanyak 11 kali. Penerimaan barang gratifikasi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) antara

DJKN dan KPK, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

No	Nomor dan Tanggal BAST	Jumlah Barang	Nilai Barang (Rp)
1	BAST-01/GTF.02.00/13/01/2023 tanggal 17 Januari 2023	854	685.405.563
2	BAST-02/GTF.02.00/13/01/2023 tanggal 22 Juni 2023	506	301.065.229
3	BAST-03/GTF.02.00/13/07/2023 tanggal 26 Juli 2023	104	50.350.000
4	BAST-04/GTF.02.00/13/08/2023 tanggal 3 Agustus 2023	3	930.000
5	BAST-05/GTF.02.00/13/08/2023 tanggal 11 Agustus 2023	11	7.000.000
6	BAST-06/GTF.02.00/13/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023	4	3.400.000
7	BAST-07/GTF.02.00/13/09/2023 tanggal 1 September 2023	5	2.100.000
8	BAST-08/GTF.02.00/13/09/2023 tanggal 27 September 2023	1	300.000
9	BAST-09/GTF.02.00/13/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023	295	113.606.171
10	BAST-10/GTF.02.00/13/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023	1	450.000
11	BAST-11/GTF.02.00/13/10/2023 tanggal 16 November 2023	1	3.850.000
	Jumlah	**1.785**	**1.168.456.963**

Selama Tahun 2023 telah dilaksanakan 10 kali lelang dengan barang yang laku terjual sebanyak 485 unit/buah/set/lembar barang gratifikasi dengan nilai perolehan sebesar Rp610.127.381 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Mutasi Keluar Tahun 2023 Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)
1	Penjualan Barang Gratifikasi 30-03-2023	61	43.870.895
2	Penjualan Barang Gratifikasi 29-05-2023	63	35.072.000
3	Penjualan Barang Gratifikasi 21-06-2023	76	44.318.326
4	Penjualan Gratifikasi 17 Juli 2023	26	259.136.100
5	Penjualan Gratifikasi 25 Juli 2023	54	67.252.560
6	Penjualan Gratifikasi 3 Oktober 2023	1	475.000
7	Penjualan Gratifikasi 12 Oktober 2023	67	37.746.000
8	Penjualan Gratifikasi 17 Oktober 2023	86	34.753.000
9	Penjualan Gratifikasi 10 November 2023	32	20.880.500
10	Penjualan Gratifikasi 13 Desember 2023	19	66.623.000
	Jumlah	**485**	**610.127.381**

Terdapat penjelasan tambahan terkait dengan penjualan barang gratifikasi di Risalah Lelang Nomor RL-289/27/2023 sebanyak 46 barang dimana angka tersebut merupakan jumlah lot laku yang terdiri dari 61 barang, RL-417/27/2023 sebanyak 42 barang dimana angka tersebut merupakan jumlah lot laku yang terdiri dari 63 barang, dan RL-486/27/2023 sebanyak 42 barang dimana angka tersebut merupakan jumlah lot laku yang terdiri dari 76 barang, RL-555/27/2023 sebanyak 51 barang dimana angka tersebut merupakan jumlah lot laku yang terdiri dari 54 barang, dengan nilai PNBP keseluruhan per 31 Desember 2023 sebesar Rp456.468.837 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Risalah Lelang	PNBP (Rp)
1	RL 289/27/2023	42.270.247
2	RL 417/27/2023	17.768.647
3	RL-486/27/2023	27.482.791
4	RL-545/27/2023	192.874.695
5	RL-555/27/2023	53.694.943
6	RL-183/64/2023	490.000
7	RL-812/27/2023	23.917.430
8	RL-815/27/2023	21.654.439
9	RL-845/42/2023	14.564.645
10	RL-998/42/2023	61.751.000
	Jumlah	**456.468.837**

Selama Tahun 2023 telah dilaksanakan 3 kali PSP sebanyak 23 unit/buah/set/lembar barang gratifikasi dengan rincian sebagaimana tabel berikut::

No	Keputusan Menteri Keuangan	BAST dan Tanggal BAST	Satker Penerima	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
1	KMK 5/KM.6/KN.4/2023	BA-4/KN.4/2023 tanggal 17 April 2023	Kementerian Keuangan c.q. KPKNL Tangerang II	5	47.699.000
2	KMK 4/KM.6/KN.4/2023	BA-6/KN.4/2023 tanggal 26 Mei 2023	Kementerian Keuangan c.q. Kantor Pusat DJP	3	32.900.000
3	KMK 9/KM.6/KN.4/2023	BAST-2/KN.4/2023 tanggal 06 Juni 2023	Komisi Pemberantasan Korupsi	19	416.496.004
Total				**27**	**497.095.004**

Selama tahun 2023, telah dilakukan 1 kali pemusnahan barang gratifikasi sejumlah 92 barang dengan nilai perolehan sebesar Rp31.967.900.000 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/MK.6/KN.4/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Pemusnahan Nomor 01/KN.43/2023 tanggal 21 Desember 2023.

Dengan demikian, saldo akhir barang gratifikasi yang dicatat sebagai aset lain-lain adalah sebesar Rp114.462.042.719. Nilai tersebut merupakan barang gratifikasi dalam pengelolaan DJKN sampai dengan 31 Desember 2023 dengan jumlah barang sebanyak 2.878 unit/buah/set/lembar.

2. ASET RAMPASAN PT TUBAN LPG INDONESIA (PT TLI)

Dalam surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor PRIN-257/M.1.10/Ft.1/01/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Sdr. Honggo Wendratno diduga telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Berdasarkan pelaksanaan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Juni 2020 atas nama HONGGO WENDRATNO, pengadilan telah menetapkan bahwa barang bukti berupa tanah dan bangunan di atasnya berupa pabrik/kilang LPG PT TLI yang berada di kawasan pabrik PT TPPI yang terletak di Jl. Tanjung Dusun Tanjung Awar-Awar, Desa Remen Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 11 dan 12 dengan alamat Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur atas nama PT. Tuban LPG Indonesia, dirampas untuk Negara cq. Menteri Keuangan RI.

Guna menjalankan putusan dimaksud, Kejaksaan RI diwakili Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah menyerahkan barang bukti dimaksud kepada Menteri Keuangan diwakili Direktur Jenderal Kekayaan Negara, sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 07 Juli 2020, bertempat di Gedung Sasana Pradana Kejaksaan Agung RI Jakarta. Dengan penyerahan sesuai BAST tanggal 07 Juli 2020 dimaksud, Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari rampasan dimaksud dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang.

BAST aset tidak mencantumkan nilai perolehan aset beserta akumulasi penyusutan maupun nilai wajar aset. Selayaknya aset tetap, memperhatikan PSAP 07 Paragraf 20, apabila penilaian aset dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset agar didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Berkenaan dengan hal tersebut telah dilakukan penilaian oleh KPKNL Surabaya sebagaimana telah disampaikan pada Laporan Penilaian Nomor LAP-0023/1/1/WKN.10/KNL.01/01.00/2021 tanggal 21 Januari 2021 diperoleh nilai wajar sebagai berikut:

No.	Objek Penilaian	Nomor dan Tanggal Laporan Penilaian	Nilai Wajar Aset (Rp)
1.	Tanah	LAP-0023/1/1/WKN.10/KNL.01/01.00/2021 tanggal 21 Januari 2021	2.277.846.000
2.	Tanah	LAP-0023/1/1/WKN.10/KNL.01/01.00/2021 tanggal 21 Januari 2021	2.309.215.000
3.	Bangunan pabrik/kilang LPG	LAP-0023/1/1/WKN.10/KNL.01/01.00/2021 tanggal 21 Januari 2021	243.523.731.000

Kemudian, dalam rangka pengamanan serta menjunjung prinsip efektif dan efisien dalam pengelolaan BMN, Kilang LPG tersebut dititipkan kepada PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) sejak tanggal 7 Juli 2020 melalui surat penitipan aset Pengelola Barang Nomor S-429/KN/2020 tanggal 7 Juli 2020 dan Berita Acara Penitipan BMN eks Rampasan tanggal 7 Juli 2020 untuk dioperasikan dengan ketentuan hasil pengelolaan Kilang LPG disetorkan ke kas negara setelah dikurangi segala biaya yang timbul akibat proses penitipan.

Atas kegiatan penitipan Kilang LPG tersebut, PT TPPI telah melakukan perhitungan hasil pengelolaan Kilang LPG (setelah dikurangi segala biaya yang timbul akibat proses penitipan) dan telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara. Sepanjang Tahun 2022, PNBP hasil pengelolaan kilang LPG yang telah disetorkan sebesar:

No.	Periode	Jumlah	Ket.
1.	1 Sept s.d. 31 Des 2021	19.290.003.553	Disetorkan pada 03 Februari 2022
2.	01 Januari s.d. 31 Maret 2022	17.738.991.941	Disetorkan pada 09 Juni 2022
3.	1 April s.d. 30 Juni 2022	16.243.904.727	Disetorkan pada 31 Agustus 2022
4.	1 Juli s.d. 30 September 2022	14.108.751.006	Disetorkan pada 3 November 2022

Kegiatan penitipan bersifat sementara sampai Pengelola Barang memutuskan bentuk pengelolaan lebih lanjut atas aset dimaksud. Dalam hal ini, Dit. PKNSI selaku Pengelola Barang telah melakukan pengkajian optimalisasi aset Kilang LPG dalam jangka pendek dengan opsi bentuk pemanfaatan sewa serta optimalisasi dalam jangka panjang menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP).

Berkenaan dengan hal tersebut, telah dilaksanakan penilaian nilai wajar atas sewa aset tersebut oleh KPKNL Surabaya sebagaimana telah disampaikan pada Laporan Penilaian Nomor LAP- 0024/1/1/WKN.10/KNL.01/01.00/2021 tanggal 21 Januari 2021 diperoleh nilai wajar atas sewa sebagai berikut:

No.	Periodesitas Sewa	Nilai Sewa (Rp)
1.	1 Tahun	20.650.659.000
2.	3 Tahun	73.184.696.000

Namun, memperhatikan trend hasil pengelolaan Kilang LPG melalui kegiatan penitipan yang cukup tinggi dibandingkan dengan nilai sewa aset tersebut, dilakukan reviu kembali atas bentuk pemanfaatan Kilang LPG yang mempertimbangkan nilai keekonomian kilang LPG sehingga lebih menguntungkan bagi Pengelola Barang dengan bentuk pemanfaatan berupa Kerja Sama Pemanfaatan untuk Mengoperasionalkan Kilang LPG.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pengelola Barang telah memintakan permohonan penilaian kelayakan bisnis KSP Operasional kepada KPKNL Surabaya melalui Nota Dinas Nomor ND-1619/KN.5/2021 tanggal 16 Juli 2021 hal Permohonan Penilaian KSP Untuk Mengoperasionalkan Barang Milik Negara berupa Kilang LPG Eks PT TLI dan saat ini sedang dilakukan proses penilaian oleh Tim Penilai KPKNL Surabaya.

Kemudian terhadap rencana KSPO tersebut, telah dilaksanakan penilaian atas Kilang LPG sebagaimana tertuang dalam Laporan Penilaian Nomor LAP-0027/1/PRO-01/WKN.10/KNL.01/01.02.02/2022 tanggal 15 Februari 2022 dan Laporan Analisis Kelayakan Bisnis Nomor Lap-001/WKN.10/KNL.01/AKB/KSP/2022 tanggal 15 Februari 2022. Atas penilaian tersebut diperoleh nilai wajar BMN berupa Kilang LPG sebesar Rp164.937.148.000 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Objek Penilaian	Nomor dan Tanggal Laporan Penilaian	Nilai Wajar (Rp) Aset
1	Tanah	LAP-0027/1/PRO-01/WKN.10/KNL.01/01.02.02/2022 tanggal 15 Februari 2022	2.279.710.000
2	Tanah	LAP-0027/1/PRO-01/WKN.10/KNL.01/01.02.02/2022 tanggal 15 Februari 2022	2.311.105.000
3	Bangunan pabrik/kilang LPG	LAP-0027/1/PRO-01/WKN.10/KNL.01/01.02.02/2022 tanggal 15 Februari 2022	160.346.333.000

Namun, tidak perlu dilakukan koreksi pencatatan nilai aset TLI untuk tahun 2022 karena tujuan penilaian kembali atas aset TLI tersebut adalah untuk memperoleh nilai wajar dalam rangka pemanfaatan aset dan bukan sebagai nilai perolehan baru. Sehingga, nilai aset TLI yang tercatat pada neraca tetap sebesar Rp248.110.792.000.

Aset TPPI dan TLI termasuk sebagai BMN yang men-supply LPG nasional yang menyangkut hajat orang banyak dan atas aset TPPI beberapa kali kilangnya mendapat arahan/atensi langsung presiden. TLI memproses offgas buangan Kilang TPPI yang membantu mewujudkan program pemerintah Zero Flaring.

Telah diperoleh hasil audit BPKP terhadap kewajaran pengenaan biaya pengelolaan kilang LPG dan tolling fee antara pihak DJKN selaku pemilik kilang, PT TPPI selaku operator, serta PT KPI selaku supplier. Tim Audit BPKP telah menyelesaikan audit atas hasil Kewajaran Biaya Pengelolaan/Pengolahan Kilang LPG eks PT TLI dengan dilaksanakannya exit meeting pada Kamis, 10 Agustus 2023 yang dihadiri perwakilan PT TPPI. Selanjutnya, telah diperoleh hasil audit sebagai berikut:

a. Diperlukan koreksi pengenaan beban oleh PT TPPI selaku operator penitipan pada beberapa pos baik biaya rutin dan non rutin dengan total sebesar Rp56.661.855.791;

b. Koreksi pembebanan biaya yang cukup materiil terdapat pada pos Estimasi Turnaround minus Rp22.782.359.246 dan pencadangan PPN serta PPh 23 minus Rp32.447.914.772.

Atas dasar hasil audit tersebut, Direktorat PKN telah bersurat kepada PT TPPI melalui surat Nomor S-1169/KN.4/2023 tanggal 31 Agustus 2023 hal Tindak Lanjut Hasil Audit Kewajaran Biaya Pengelolaan Kilang LPG eks PT TLI dan telah ditindaklanjuti oleh PT TPPI dengan menyetorkan hak negara sebesar Rp56.661.855.791 pada tanggal 27 September 2023.

D.2.1.6.6.10. Aset Lain-Lain BA 999.03

Aset Lain-lain BA 999.03 per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp822.118.554.755 dan Rp810.653.723.664 berdasarkan instansi/unit terkait dapat dirinci sebagai berikut (dalam Rp):

No.	Rincian	2023	2022
1	UAIP	-	13.234.602.981
	- Aset eks Dana bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	-	13.234.602.981

No.	Rincian	2023	2022
2	BLU LMAN	822.118.554.755	797.419.120.683
	- Aset eks BPPN	50.142.844.000	-
	- Aset eks kelolaan PT PPA	169.178.500.393	187.409.252.504
	- Aset eks Pertamina	583.403.259.612	590.639.298.679
	- Aset lain-lain BUN	19.393.950.750	19.370.569.500
	TOTAL	822.118.554.755	810.653.723.664

Aset lain-lain pada Laporan Keuangan BA 999.03 terdiri dari :

1) Aset Lain lain pada UAIP merupakan reklasifikasi dari dana bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Aset eks Dana bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaporkan pada neraca Laporan Keuangan BA 999.03 per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp13.234.602.981.

   Inspektorat Jenderal KKP secara bertahap dari Tahun 2021 s.d. 2022 telah melaksanakan reviu aset dan kas Kelompok Usaha Bersama (KUB) eks dana bergulir pada 13 UPT DJPT yang menerima alokasi dana bergulir dengan menghasilkan Catatan Hasil Reviu (CHR) dengan simpulan hasil reviu sebagai berikut:

   - Total dana bergulir yang disalurkan melalui 13 UPT DJPT Tahun 2003 s.d. 2005 adalah senilai Rp13.783.148.145,67. Pada saat reviu dilaksanakan, seluruh KUB penerima dana bergulir sudah tidak beroperasi atau tidak menjalankan aktivitas kegiatan serta tidak mengelola dana maupun aset yang berasal dari eks dana bergulir.
   - Aset eks dana bergulir yang sebagian besar berupa sarana penangkapan ikan antara lain cool box, keranjang ikan, jaring, kapal, sepeda motor, pelampung, box styrofoam, dll sudah dalam kondisi rusak berat dan usang sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi.

   Dengan demikian, terdapat pemutakhiran angka dana bergulir yang disalurkan dari awalnya sebesar Rp13.234.602.981 menjadi Rp13.783.148.145.

   Selanjutnya, berdasarkan BAST Nomor BA-26/KN.3/2023 dan BAST Nomor BAST-KPB.1794/DJPT.1/PL.450/XII/2023, dilaksanakan pemindahbukuan Aset Lain-Lain BUN berupa Aset eks Dana bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dari Laporan Keuangan BUN BA 999.03 Lingkup UAIP kepada Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (BA 032) tingkat UAKPA Sekretariat DJPT mulai periode pelaporan Tahun 2023.

   Sebagai akibat pemindahbukuan ini, pencatatan Aset Lain-Lain BUN berupa Aset eks Dana bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang awalnya dicatat pada Laporan Keuangan BUN BA 999.03 Lingkup UAIP menjadi dicatat pada Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (BA 032) tingkat UAKPA Sekretariar DJPT. Oleh karena itu, tidak lagi terdapat Aset Lain-Lain BUN berupa Aset eks Dana bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dicatat pada Laporan Keuangan UAIP mulai periode pelaporan

Tahun 2023.

Dana bergulir pada Kementerian Kelautan merupakan bagian dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2004. Program PUPTSK terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:

a) Optimasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI);

b) Optimasi Pelelangan Ikan (OPTILANPI);

c) Optimasi Pengolahan dan Distribusi Ikan (OPTIHANDIS);

d) Optimasi Kelompok Usaha Bersama (OPTIKUB).

Sasaran dari program PUPTSK adalah nelayan dan pengolah ikan skala kecil. Mengingat pendidikan/keterampilan dan kondisi sosial ekonomi mereka pada umumnya relatif rendah, maka diperlukan peran optimal Pemerintah dalam memberdayakan mereka.

Dana bergulir yang dilaporkan pada dasarnya adalah bantuan barang dalam program PUPTSK, dimana Kelompok Usaha Barang (KUB) penerima barang mempunyai kewajiban untuk menggulirkan barangnya kembali kepada KUB lain, dengan cara hasil dari operasional sebuah KUB disetorkan kepada instansi daerah (UPT/Kantor Dinas) selaku pihak pembina yang akan meneruskannya kembali kepada KUB lain yang membutuhkan, sehingga terjadi efek perguliran.

PUPTSK terutama OPTIKAPI dan OPTIHANDIS tidak diberikan kepada perorangan, melainkan pada satu komunitas yang tergabung dalam kelompok dan satu-satunya kelompok yang menerima program PUOTSK adalah Kelompok Usaha Bersama (KUB). KUB dimaksud dapat berupa KUB multi usaha atau KUB yang bergerak pada bidang usaha tertentu dengan diberikan sub program PUPTSK yang sesuai. Program OPTIKUB terutama diarahkan kepada KUB-KUB yang masih memerlukan pembinaan, baik dalam manajemen maupun pengembangan usaha. Sedangkan OPTILANPI diberikan terhadap institusi lelang, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan KUB.

Bantuan barang yang diberikan kepada KUB punya andil dalam mencapai tujuan masyarakat yang mandiri, melihat kondisi nelayan kita yang masih membutuhkan perhatian Pemerintah, bantuan barang dapat secara langsung menunjang kegiatan operasional para nelayan.

Bantuan berupa barang diberikan secara bergiliran dari KUB yang berhasil kepada KUB berikutnya. Program bantuan dalam PUPTSK diberikan kepada KUB sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut:

a) KUB yang belum pernah atau tidak menerima bantuan program PUPTSK pada tahun sebelumnya, untuk lebih memperluas bantuan program secara lebih merata;
b) Program penyaluran dana bergulir sudah berhenti;
c) Banyak aset dana bergulir tersebut yang telah rusak atau hilang;
d) KUB yang telah memenuhi manajemen operasional dan keuangan yang relatif baik. Hal ini untuk lebih menjamin kelancaran perguliran bantuan yang diberikan dan juga untuk meningkatkan peluang keberhasilan program.

Pada tahun 2010, dana bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan masih dicatat dan dilaporkan pada Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2011, dana bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dicatat dan dilaporkan pada Laporan Keuangan BA 999.03 sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah.

Berdasarkan penelitian, diskusi dan *pilot project* inventarisasi dan verifikasi yang telah dilakukan, aset dana bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan direklasifikasi dari akun dana bergulir menjadi akun aset lain-lain, dengan pertimbangan sebagai berikut:

a) Program penyaluran dana bergulir sudah berhenti;
b) Banyak aset dana bergulir tersebut yang telah rusak atau hilang; dan
c) Aset tersebut sudah tidak digulirkan lagi.

2) Aset Lain-Lain BLU LMAN

Total aset lain-lain LMAN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp822.118.554.755 dan Rp797.419.120.683. Aset lain-lain LMAN terdiri dari :

Aset lain-lain LMAN terdiri dari:

No.	Rincian	Jumlah
BLU LMAN		
1	Aset eks BPPN	50.142.844.000
2	Aset eks kelolaan PT PPA	169.178.500.393
3	Aset eks Pertamina	583.403.259.612
4	Aset lain-lain BUN	19.393.950.750
	TOTAL	**822.118.554.755**

1. Aset Eks BPPN

Posisi Aset Lain-lain eks BPPN pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp50.142.844.000 dan Rp0. Terdapat penambahan Aset eks BPPN dari penyerahkelolaan sebesar Rp69.116.658.920 dengan rincian sebagai berikut:

a. Kep-4/KN/2022 tanggal 22 Desember 2022 yang diserahterimakan melalui BAST per tanggal 11 Januari 2023 untuk 6 (enam) unit aset berupa apartemen, serta tanah dan bangunan yang berlokasi di Surabaya, Yogyakarta, dan Tanjung Pinang dengan nilai per dokumen penyerahkelolaan sebesar Rp40.543.018.920.

b. Kep-82/KN/2023 tanggal 09 Mei 2023 yang diserahterimakan melalui BAST per tanggal 19 Mei 2023 untuk 2 (dua) unit aset berupa tanah serta tanah dan bangunan yang berlokasi di Serang dan Ancol Jakarta dengan nilai per dokumen penyerahkelolaan sebesar Rp28.573.640.000.

Sebesar Rp18.973.814.920 telah dilakukan reklasifikasi ke Properti Investasi eks BPPN.

2. Aset Eks Kelolaan PT PPA

Nilai aset Lain-lain eks Kelolaan PT PPA menyajikan Aset eks PPA yang tidak

direklasifikasi ke properti investasi. Posisi Aset eks PPA pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp169.178.500.393 dan Rp187.409.252.504.

Secara terperinci mutasi Aset eks PPA sebelum akumulasi penyusutan pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Posisi 31-Des-2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31-Des-2023
Tanah	169.015.853.361	-	(17.525.697.111)	151.490.156.250
Gedung dan Bangunan	18.393.399.143	-	(705.055.000)	17.688.344.143
	187.409.252.504	**-**	**(18.230.752.111)**	**169.178.500.393**

Pada tahun 2023 terdapat penghentian pengakuan Aset eks Kelolaan PT PPA karena penarikan oleh DJKN selaku Pengelola Barang. Terdapat 2 (dua) aset yang dilakukan penarikan yaitu Aset Tambora dan Aset Panglima Polim 57. Penarikan tersebut dimuat dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-5/KN/2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-2/LMAN/2023 tanggal 11 Januari 2023.

3. Aset Eks Pertamina

Posisi Aset eks Pertamina pada pengelolaan LMAN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp583.403.259.612 dan Rp590.639.298.679.
Secara terperinci mutasi Aset eks Pertamina sebelum akumulasi penyusutan pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Kelompok	Posisi 31-Des-2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31-Des-2023
Kawasan	442.440.548.608	947.898.000	(2.755.967.894)	440.632.478.714
Non-Kawasan	148.198.750.071	-	(5.427.969.173)	142.770.780.898
	590.639.298.679	**947.898.000**	**(8.183.937.067)**	**583.403.259.612**

Pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 terdapat pemindahtanganan melalui lelang atas properti investasi dan aset lain-lain eks Pertamina berupa:

a. 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) unit peralatan, mesin, dan kendaraan bermotor serta 1 (satu) paket bongkaran gedung. Pemindahtanganan tersebut dituangkan dalam Risalah Lelang nomor 11/02/2023 tanggal 01 Februari 2023 dengan hasil lelang adalah sebesar Rp101.099.999. Atas aset yang dipindahtangankan tersebut telah diterbitkan Keputusan penghapusan nomor KEP-70/LMAN/2023 tanggal 23 November 2023.

b. Scrap kapal bermotor dan 3 (tiga) unit tug boat dengan nilai sebesar Rp3.883.101.308. Pemindahtanganan tersebut dituangkan dalam Risalah Lelang nomor 57/02/2023 tanggal 05 April 2023. Harga jual lelang adalah sebesar Rp3.803.888.999. Atas aset yang dipindahtangankan tersebut telah diterbitkan Keputusan penghapusan nomor KEP-69/LMAN/2023 tanggal 23 November 2023.

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI terkait pemutakhiran data aset Kilang LNG Badak, Entitas telah melakukan rekonsiliasi data dengan PT Pertamina (Persero) selaku mitra pengelolaan Kilang LNG Badak dan PT Badak NGL selaku operator Kilang LNG

Badak. Pada rekonsiliasi data yang dilakukan di Januari 2024 untuk saldo 31 Desember 2023, diketahui bahwa terdapat 108 (seratus delapan) line item aset yang telah dihapuskan dengan KMK penghapusan bertanggal sebelum tanggal penyerahkelolaan ke LMAN serta 1 (satu) line item aset yang tercatat ganda. Atas 109 (seratus sembilan) line item tersebut dilakukan penghentian pengakuan sejak laporan keuangan ini.

4. Aset Lain-lain BUN

Pos Aset Lain-lain BUN menyajikan:

1) Aset hasil pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020, dan PMK Nomor 139/PMK.06/2020 yang belum dihentikan pengakuannya melalui pengesahan belanja modal pada KL.
2) Aset eks Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI) yang tidak memenuhi klasifikasi Properti Investasi.

Posisi Aset Lain-lain BUN (sebelum akumulasi) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp19.393.950.750 dan Rp19.370.569.500. Akumulasi penyusutan sebesar Rp115.410.855, sehingga nilai aset lain-lain BUN bersih Rp19.278.539.895 yang terdiri dari Aset Tanah PSN sebesar Rp0 dan Aset Lain-lain BUN eks HTBI (setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp19.278.539.895.

1) Aset Tanah Infrastruktur Proyek Strategis Nasional

Sesuai PMK Nomor 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara, pencatatan aset hasil pengadaan tanah oleh LMAN dilakukan sebesar ganti kerugian kepada pihak yang berhak dalam skema pembayaran langsung dan sebesar penggantian dana kepada badan usaha untuk skema penggunaan dana badan usaha terlebih dahulu. Selanjutnya, LMAN akan melakukan penghentian pengakuan atas aset hasil pengadaan tanah setelah adanya pengesahan belanja modal oleh kementerian/lembaga terkait.

Posisi Aset Lain-lain BUN tanah PSN pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0. Seluruh pengeluaran dana jangka panjang untuk pengadaan tanah PSN di tahun 2023 telah dilakukan pengesahan sehingga saldo aset tanah PSN pada 31 Desember 2023 adalah Rp0.

Rincian mutasi Aset Tanah PSN pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nominal (Rp)
Posisi per 31 Desember 2022	-
Penggunaan dana untuk pembayaran langsung	17.142.475.041.821
Penggunaan dana untuk penggantian dana talangan	1.064.608.892.506
Penghentian pengakuan aset tanah PSN setelah pengesahan semester I 2023	(7.790.076.030.719)
Penghentian pengakuan aset tanah PSN setelah pengesahan semester II 2023	(10.417.007.903.608)
Posisi 31 Desember 2023	**-**

Pengesahan belanja modal pada tahun 2023 yang dirinci per K/L per jenis proyek per semester adalah sebagai berikut:

Periode Semester I 2023	Jumlah SP2D	Nominal	Luas Tanah
Kementerian Perhubungan:			
Jalur Kereta Api	4	190.506.478.857	197.390
Pelabuhan	1	975.468.666	541
Kementerian PUPR			
Jalan Tol	38	6.368.296.726.628	8.886.506
Bendungan	19	953.665.328.569	9.635.728
Irigasi	3	19.633.985.720	272.197
Air Baku	1	11.336.549.000	29.195
IKN	7	245.661.493.279	803.807
Total Pengesahan Semester I 2023	**73**	**7.790.076.030.719**	**19.825.364**

Periode Semester II 2023	Jumlah SP2D	Nominal	Luas Tanah
Kementerian Perhubungan:			
Jalur Kereta Api	4	167.607.689.854	156.406
Pelabuhan	-	-	-
Kementerian PUPR			
Jalan Tol	38	8.028.882.714.240	6.410.284
Bendungan	19	1.016.298.074.522	6.404.217
Irigasi	3	12.135.037.500	188.706
Air Baku	1	11.608.715.480	23.079
IKN	7	1.180.475.672.012	2.103.675
Total Pengesahan Semester II 2023	**72**	**10.417.007.903.608**	**15.286.367**

2) Aset Eks Hak Tanggungan Bank Indonesia

Posisi Aset Lain-lain BUN eks HTBI per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp19.393.950.750 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp115.410.855 sehingga nilai bersih Aset Lain-lain BUN eks HTBI adalah sebesar Rp19.278.539.895. Mutasi Aset Lain-lain BUN eks HTBI pada periode yang berakhir di 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Posisi 31-Des-2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31-Des-2023
Tanah	18.912.569.500	23.381.250	-	18.935.950.750
Gedung dan Bangunan	458.000.000	-	-	458.000.000
	19.370.569.500	**23.381.250**	**-**	**19.393.950.750**

Pos Aset Lain-lain BUN eks HTBI ini menyajikan aset kelolaan Entitas yang berasal dari aset eks Pertamina yang tidak memenuhi kriteria penyajian sebagai Properti Investasi.

D.2.1.6.6.11. Aset Lain-Lain BA 999.08

Aset lain-lain pada BA 999.08 per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp42.911.594.436 dan Rp0. Aset lain-lain tersebut berasal dari Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi merupakan BMN berupa Kendaraan Beromotor Roda Empat pada Satuan Kerja Otoritas Jasa Keuangan perolehan Tahun Anggaran 2013 – 2014 yang rencananya akan dipindahtangankan melalui mekanisme Penjualan – Lelang maupun Hibah. Mutasi tersebut didasarkan pada Surat Keterangan Penghentian Penggunaan BMN pada OJK Nomor S-16/SPSP/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 dan Nomor S-17/SPSP/XII/2023 tanggal 18

Desember 2023.

D.2.1.6.7. ASET LAINNYA DARI EKUITAS PADA UBL

Jumlah Aset Lainnya dari ekuitas UBL per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp29.854.766.285.853 dan Rp29.625.443.493.878 mengalami penurunan sebesar Rp229.322.791.975 atau (0,77%) merupakan Aset Lainnya dari Unit Badan Lainnya yang berada di 8 (delapan) Unit Badan Lainnya Bukan Satker.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya pada neraca Laporan Keuangan Badan Lainnya merupakan nilai ekuitas bersih dari UBL bukan satuan kerja.

Rincian aset lainnya UBL berdasarkan instansi/unit terkait dapat dirinci sebagai berikut (dalam Rp):

NO	UBL	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Otorita Asahan	5.396.635.686	5.396.635.686
2	Taman Mini Indonesia Indah	4.334.012.243	4.334.012.243
3	Yayasan Gedung Veteran	4.269.425.631	-
4	Baznas	372.961.149.121	186.239.265.940
5	Badan Wakaf Indonesia	26.562.574.185	20.372.797.851
6	SKK MIGAS	-	-
7	Badan Pengelola Keuangan Haji	20.956.233.856.603	21.539.318.410.709
8	Otoritas Jasa Keuangan	8.485.008.632.384	7.869.782.371.449
JUMLAH		29.854.766.285.853	29.625.443.493.878

Penjelasan Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

1. Aset Lainnya yang berasal dari Otorita Asahan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.396.635.686 dan Rp5.396.635.686. Aset Lainnya sebesar Rp5.396.635.686 merupakan total ekuitas bersih Otorita Asahan berdasarkan laporan keuangan penutup Otorita Asahan hasil audit BPKP per tanggal 15 Mei 2019 dikurangi nilai Aset yang telah dilikuidasi periode 2022 Audited. Selanjutnya, berdasarkan Surat Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-604/AG/2014 tanggal 10 April 2014 hal penyampaian SP-SABA.999.08 untuk keperluan penyediaan anggaran untuk gaji, operasional dan kegiatan Otorita Asahan TA 2014 dan Surat penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran NOMOR DIPA: 019.01.1.247101/2015 Tanggal 14 November 2015, dialokasikan Pagu Program Rp8.300.000.000 Unit Organisasi 019.01 Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian.

   Otorita Asahan telah dibubarkan dengan Peraturan Presiden nomor 73 Tahun 2018 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan, berdasarkan pasal 2 dan 3 barang milik negara pada Otorita Asahan diserahkan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola barang kecuali yang telah tercatat pada Kementerian Perindustrian dan seluruh dokumen yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Otorita Asahan diserahkan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian

dan/atau Arsip Nasional Republik Indonesia. Pimpinan dan karyawan pada Otorita Asahan diberhentikan dengan hormat dan diberikan uang penghargaan yang besarannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibebankan kepada DIPA Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2018.

Proses likuidasi Otorita Asahan sampai dengan tahun 2023 masih dalam proses penyelesaian berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tim Likuidasi Otorita Asahan, bahwa tim likuidasi dimaksud bertugas terhitung 3 September 2018 sampai dengan selesainya pelaksanaan likuidasi atas Otorita Asahan.

2. Aset Lainnya dari Yayasan Harapan Kita/Badan Pengelola dan Pengembangan Taman Mini Indonesia Indah (YHK/BPP TMII) yang disajikan pada Laporan Keuangan Badan Lainnya per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.334.012.243 dan Rp4.334.012.243. Aset Lainnya Sebesar Rp4.334.012.243 merupakan nilai ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan YHK/BPP TMII Tahun 2020 Audited serta hasil Inventarisasi Aset Tahap I Kemensetneg pada TMII. Sampai dengan batas akhir penyampaian LK Badan Lainnya Tahun 2023 *Audited*, TMII masih dalam proses Likuidasi yang dilakukan dengan Inventarisasi Aset Tahap II oleh Kemensetneg.

   Dalam penyusunan Laporan Keuangan, YHK/BPP TMII berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Yayasan Harapan Kita TMII telah dibubarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah, sesuai pasal 1 ayat 1 penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara, dan pasal 2 dengan ditetapkannya penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Kementerian Sekretariat Negara maka pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Yayasan Harapan Kita berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 dinyatakan berakhir.

3. Aset Lainnya yang berasal dari Yayasan Gedung Veteran tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.269.425.631 dan Rp0. Aset Lainnya sebesar Rp4.269.425.631 adalah total ekuitas bersih Yayasan Gedung Veteran berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan Gedung Veteran Tahun 2023 *Unaudited* dikarenakan YGVRI belum menyampaikan Laporan Keuangan 2023 *Audited* yang dijadwalkan pada Agustus 2024. Laporan keuangan Yayasan Gedung Veteran disusun berdasarkan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) dan PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

4. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Amil Zakat Nasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp372.961.149.121 dan Rp186.239.265.940. Aset Lainnya yang berasal dari Baznas sebesar Rp372.961.149.121 merupakan total Ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Baznas Tahun 2023 *Unaudited*. Aset Lainnya Badan Amil Zakat Nasional dicatat berdasarkan Laporan Keuangan 2023 *Unaudited* dikarenakan Baznas belum menyampaikan Laporan Keuangan 2023 *Audited* yang dijadwalkan pada Juni 2024. Laporan Keuangan BAZNAS disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor

109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sejak tanggal 1 Januari 2012.

5. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Wakaf Indonesia per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp26.562.574.185 dan Rp20.372.797.851. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Wakaf Indonesia sebesar Rp26.562.574.185 merupakan total ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan BWI Tahun 2023 *Audited*. Aset Lainnya dari Badan Wakaf Indonesia merupakan jumlah keseluruhan dana yang bersumber dari APBN dan Dana Wakaf. Dalam penyusunan laporan keuangan, Badan Wakaf Indonesia berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 mengenai Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba dimodifikasi dengan akuntansi pemerintahan karena Badan Wakaf Indonesia menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6. Aset Lainnya yang berasal dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp0 dan Rp0.

   Aset Lainnya sebesar Rp0 merupakan total ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan SKK MIGAS Tahun 2023 *Audited* sebesar minus Rp1.586.205.790.144 ditambah penyesuaian atas pos Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.660.009.089.537 dikurangi ekuitas bersih pada Laporan Keuangan satuan kerja SKK MIGAS (BA 999.08) sebesar Rp104.647.322.773 dan dilakukan penyesuaian atas penyajian Ekuitas Negatif sebesar minus Rp30.844.023.380.

   Rincian perhitungan ekuitas bersih SKK Migas sebagai berikut :

KETERANGAN	Nilai
Ekuitas Bersih SKK Migas Bukan Satker	(1.586.205.790.144)
Penyesuaian Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	1.660.009.089.537
Dikurangi Ekuitas Bersih Satker SKK Migas BA 999.08	(104.647.322.773)
Penyesuaian Penyajian Ekuitas Negatif	30.844.023.380
Aset Lainnya yang berasal dari SKK Migas	-

   Penyesuaian atas ekuitas bersih BPMIGAS per 13 November 2012 tidak dilakukan lagi pada tahun 2018 berdasarkan Nota Dinas Menteri Keuangan Nomor ND-1/MK.05/2018 tanggal 9 November 2018 hal Penyesuaian Kebijakan Pencatatan Ekuitas Bersih Eks BP Migas, bahwa nilai ekuitas bersih eks BP Migas disajikan pada Laporan Keuangan Badan Lainnya dan tidak lagi dicatat dan disajikan sebagai Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara pada Laporan Keuangan BA BUN Investasi Pemerintah (BA 999.03). Selanjutnya terhadap penyesuaian pos Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 November 2012 yang membubarkan kelembagaan BPMIGAS, pemerintah telah menerbitkan beberapa payung hukum sebagai berikut:

   1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang mengatur bahwa pelaksanaan

tugas dan fungsi kegiatan usaha hulu migas dialihkan ke menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi, sampai dengan diterbitkannya peraturan yang baru.

2) Keputusan Menteri ESDM Nomor 3135 K/08/MEM/2012 tentang Pengalihan Tugas, Fungsi, dan Organisasi, dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang antara lain menetapkan bahwa:

   a) pelaksanaan tugas, fungsi dan organisasi dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi kepada Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKSP Migas);

   b) Seluruh personalia Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dialihkan kepada SKSP Migas.

3) Keputusan Menteri ESDM Nomor 3136 K/73/MEM/2012, yang antara lain menetapkan bahwa:

   a) Para pekerja yang semula jabatannya sebagai Wakil Kepala dan Deputi pada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas dialihkan pada jabatan yang sama pada SKSP Migas;

   b) Seluruh pejabat dan pekerja lainnya dialihkan sebagai pejabat dan pekerja pada SKSP Migas dengan jabatan yang sama.

4) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang antara lain mengatur bahwa pegawai SKK Migas untuk pertama kali berasal dari pengalihan pegawai eks Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dapat diketahui bahwa :

a) Tidak terjadi pemutusan hubungan kerja antara eks BPMIGAS dengan para pekerjanya.

b) Tidak ada kewajiban finansial yang harus ditanggung oleh Pemerintah terkait pengalihan para pekerja eks BPMIGAS baik ke SKSP Migas maupun ke SKK Migas.

7. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Pengelola Keuangan Haji per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp20.956.233.856.603 dan Rp21.539.318.410.709. Aset Lainnya sebesar Rp20.956.233.856.603 merupakan Aset Bersih Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2023 *Audited*. Laporan Keuangan BPKH yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan syariah, PSAK umum lainnya untuk transaksi yang belum diatur pada PSAK Syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan ISAK 35 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba.

8. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

   Otoritas Jasa Keuangan ditetapkan sebagai UBL Satker dan UBL Bukan Satker. Hal ini

dilakukan mengingat OJK sebagai sebuah lembaga yang independen, namun di sisi lain juga merupakan UBL Satker dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) 999.08 (BA BUN Belanja Lain-Lain).

Aset bersih OJK selaku satker BA 999.08 per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp117.479.832 dan Rp8.479.840.532.

Selanjutnya, sebagai UBL Bukan Satker OJK mulai tahun 2014 mulai melakukan pungutan. Pungutan ini dilakukan sehubungan dengan fungsi, tugas dan wewenang OJK dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sektor jasa keuangan serta edukasi dan perlindungan konsumen sebagaiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam PP di atas, mengatur antara lain bahwa pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administrasi, pengadaan aset, serta kegiatan pendukung lainnya pada tahun anggaran berikutnya. Dalam hal pungutan pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke kas negara. Berdasarkan Laporan Keuangan Otoritas Jasa, selaku lembaga independen nilai aset OJK per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.485.126.112.216 dan Rp7.878.262.211.981. Saldo Aset Lainnya dari OJK sebagai bukan satker Tahun 2022 Audited berdasarkan Laporan Keuangan OJK yang telah diaudit adalah sebesar Rp7.878.262.211.981.

Berdasarkan dua Laporan Keuangan OJK yaitu selaku satuan kerja BA BUN 999.08 dan OJK selaku lembaga independen, maka untuk konsolidasi Laporan Keuangan, nilai aset bersih OJK adalah sebesar Rp8.485.008.632.384, yaitu nilai ekuitas bersih OJK selaku lembaga dikurangi dengan nilai ekuitas OJK selaku satker BA BUN 999.08. Hal ini dilakukan karena selaku satker BA BUN 999.08, laporan keuangan telah dikonsolidasi pada LK BA BUN 999.08.

Laporan Keuangan OJK disusun berdasarkan Standar dan Kebijakan Akuntansi yang dituangkan dalam PDK Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, yang diubah terakhir dengan PDK Nomor 2/PDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK.

D.2.1.6.8. AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI PADA ASET LAINNYA

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp313.057.084.376.498 dan Rp284.543.826.672.654 dengan perhitungan sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Aset Lainnya (BA 999.03)	425.242.810.889	415.810.802.081
2.	Aset Lainnya (BA 999.08)	139.690.103.410	165.022.930.588

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
3.	Aset Lainnya (BA 999.99)	312.492.151.462.199	283.962.992.939.985
	Jumlah	**313.057.084.376.498**	**284.543.826.672.654**

D.2.1.6.8.1. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya BA 999.03

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	BA 999.03 – Eks Kelolaan PT PPA	1.247.388.940	430.160.983
2.	BA 999.03 – Aset Eks Pertamina	423.880.011.094	415.311.394.585
3.	BA 999.03 – Aset Lain-lain BUN	115.410.855	69.246.513
	Jumlah	**425.242.810.889**	**415.810.802.081**

1. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA BA 999.03 ASET EKS KELOLAAN PT PPA

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain eks Kelolaan PT PPA yang berada pada pengelolaan LMAN per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.247.388.940 dan Rp430.160.983.

Akumulasi Penyusutan	Posisi 31-Des-2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31-Des-2023
Gedung dan Bangunan	430.160.983	861.293.895	(44.065.938)	1.247.388.940
	430.160.983	**861.293.895**	**(44.065.938)**	**1.247.388.940**

2. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA BA 999.03 ASET EKS PERTAMINA

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain eks Pertamina yang berada pada pengelolaan LMAN per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp423.880.011.094 dan Rp415.311.394.585.

Akumulasi Penyusutan	Posisi 31-Des-2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31-Des-2023
Kawasan	414.997.150.085	11.279.692.330	(2.755.967.893)	423.520.874.522
Non-Kawasan	314.244.500	44.892.072	-	359.136.572
	415.311.394.585	**11.324.584.402**	**(2.755.967.893)**	**423.880.011.094**

3. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA BA 999.03 ASET LAIN-LAIN BUN (EKS HTBI)

Nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain BUN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp115.410.855 dan Rp69.246.513.

Akumulasi Penyusutan	Posisi 31-Des-2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31-Des-2023
Gedung dan Bangunan	69.246.513	46.164.342	-	115.410.855
	69.246.513	**46.164.342**	**-**	**115.410.855**

D.2.1.6.8.2. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA BA 999.08

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp139.690.103.410 dan Rp165.022.930.588. Akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya terdiri dari:

1. Akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar Rp42.911.594.436;
2. Akumulasi amortisasi *software* sebesar Rp95.426.490.124;
3. Akumulasi amortisasi lisensi sebesar Rp1.352.018.850.

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2023	31 Desember 2022
999.08	Otoritas Jasa Keuangan		
	Akumulasi Amortisasi *Software*	-	31.915.327.104
	Akumulasi Amortisasi Lisensi	-	42.499.329.857
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	42.911.594.436	-
999.08	SKK Migas		
	Akumulasi Amortisasi *Software*	95.426.490.124	89.484.286.627
	Akumulasi Amortisasi Lisensi	1.352.018.850	1.123.987.000
Total		**139.690.103.410**	**165.022.930.588**

D.2.1.6.8.3. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA BA 999.99

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp312.492.151.462.199 dan Rp283.962.992.939.985, mengalami kenaikan sebesar Rp28.529.158.522.214 atau (10,05%) yang terdiri dari akumulasi penyusutan aset lain-lain Aset Eks Pertamina, akumulasi penyusutan aset lain-lain aset BMN *Idle*, akumulasi penyusutan aset KKKS dan akumulasi penyusutan aset PKP2B.

Kelompok	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Akumulasi penyusutan aset BMN Idle	7.275.644.182	5.796.697.173
Akumulasi penyusutan aset Hulu Migas pada PPBMN	41.889.055	22.869.948
Akumulasi penyusutan aset Hulu Migas pada SKK Migas	304.346.680.186.626	276.024.402.148.317
Akumulasi penyusutan aset Hulu Migas pada BPMA	6.530.194.618.480	6.384.148.840.234
Akumulasi penyusutan aset PKP2B	1.589.463.650.617	1.535.885.268.820
Akumulasi penyusutan Aset Lain-lain	18.495.473.239	12.737.115.493
TOTAL	**312.492.151.462.199**	**283.962.992.939.985**

1. Akumulasi Penyusutan Aset BMN Idle

Guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat maka diimplementasikan penyusutan BMN termasuk untuk BMN *idle* yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang.

No.	Akun Neraca	Nilai (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	710.300.000	-	710.300.000
2	Gedung dan Banguan	19.370.872.095	7.275.644.182	12.095.227.913
	Total	**20.081.172.095**	**7.275.644.182**	**12.095.227.913**

Akumulasi penyusutan pada akhir periode Tahun 2023:

Akumulasi penyusutan periode Tahun 2022 (Audited)	**5.796.697.173**
Penyusutan Reguler	528.049.087
Penyusutan Transaksional mutasi tambah BMN idle	1.022.889.616
Penyusutan Transaksional mutasi kurang BMN eks idle	(71.991.694)
Akumulasi penyusutan periode Tahun 2023	**7.275.644.182**

2. Akumulasi Penyusutan Aset Hulu Migas/KKKS Pada PPBMN

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp41.889.055 dan Rp22.869.948. Akumulasi penyusutan aset non tanah yang disajikan dalam Neraca terdiri dari akumulasi penyusutan aset non tanah berupa HBM dan HBI. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebagai berikut:

Saldo Awal 1 Januari 2023	**22.869.949**
Mutasi Tambah	19.019.106
Mutasi Kurang	-
Saldo Akhir 31 Desember 2023	**41.889.055**

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang berasal dari HBM

Saldo Awal 1 Januari 2023	**-**
Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan:	12.805.500
Koreksi Tambah	12.805.500
Mutasi Kurang	-
Saldo Akhir 31 Desember 2023	**12.805.500**

Penjelasan atas penyusutan aset HBM yang disajikan dalam Neraca adalah sebagai berikut:

a. Saldo awal merupakan penyusutan Aset HBM yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2022 (audited);

b. Koreksi tambah akumulasi penyusutan Aset HBM sebesar Rp12.805.500 berasal dari alih terima HBM pada KKKS Husky Anugerah Limited.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang berasal dari HBI

Saldo Awal 1 Januari 2023	**22.869.949**
Mutasi Tambah:	6.213.606
Koreksi Tambah	6.213.606
Mutasi Kurang	-
Saldo Akhir 31 Desember 2023	**29.083.555**

Penjelasan atas penyusutan aset HBI yang disajikan dalam Neraca adalah sebagai berikut:

a. Saldo awal merupakan penyusutan Aset HBI yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2022 (audited);
b. Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan HBI sebesar Rp6.213.606 berasal alih terima HBI pada KKKS Husky Anugerah Limited.

3. Akumulasi Penyusutan Aset Hulu Migas/KKKS Pada SKK Migas

Akumulasi penyusutan aset non tanah terdiri dari:

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang berasal dari HBM

Saldo Awal 1 Januari 2023	**275.917.673.188.074**
Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan:	**29.769.549.459.675**
Penyusutan Tahun Berjalan	25.578.548.118.189
Koreksi Tambah	4.191.001.341.486
Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan:	**1.453.243.994.030**
Koreksi Kurang	1.453.243.994.030
Saldo Akhir 31 Desember 2023	**304.233.978.653.719**

1. Saldo awal sebesar Rp275.917.673.188.074 merupakan saldo Laporan Keuangan BMN Hulu Migas UAKPA BUN TK Tahun 2022 audited.
2. Penambahan penyusutan HBM sebesar Rp29.769.549.459.675 berasal dari:
   a. Beban penyusutan tahun berjalan sebesar Rp25.578.548.118.189.
   b. Koreksi tambah penyusutan sebesar Rp4.191.001.341.486, disebabkan karena adanya koreksi tambah nilai perolehan HBM, perubahan kategori, perubahan tanggal PIS, serta adanya aset perolehan tahun sebelum tahun 2023 yang baru dicatatkan ditahun 2023.
3. Pengurangan penyusutan HBM sebesar Rp1.453.243.994.030 berasal dari koreksi kurang penyusutan yang disebabkan koreksi kurang nilai perolehan HBM, perubahan kategori, perubahan tanggal PIS, penghapusan aset, dan aset yang dalam proses penghapusan.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang berasal dari HBI

Penjelasan atas penyusutan aset HBI yang disajikan dalam Neraca 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal 1 Januari 2023	**106.728.960.243**
Mutasi Tambah:	**9.253.670.202**
Penyusutan Tahun Berjalan	7.226.404.530
Koreksi Tambah	2.027.265.672
Mutasi Kurang:	**3.281.097.538**
Koreksi Kurang	3.281.097.538
Saldo Akhir 31 Desember 2023	**112.701.532.907**

1. Saldo awal sebesar Rp106.728.960.243 merupakan saldo Laporan Keuangan BMN Hulu Migas UAKPA BUN TK Tahun 2022 audited.
2. Penambahan Akumulasi Penyusutan HBI sebesar Rp9.253.670.202 terdiri dari:
   a. Penyusutan tahun berjalan sebesar Rp7.226.404.530.
   b. Koreksi tambah penyusutan sebesar Rp2.027.265.672 disebabkan karena adanya koreksi tambah nilai perolehan HBI, perubahan kategori, perubahan tanggal PIS, serta adanya aset perolehan tahun sebelum tahun 2023 yang baru dicatatkan di tahun 2023.
3. Pengurangan Akumulasi Penyusutan HBI sebesar Rp3.281.097.538 berasal dari koreksi kurang penyusutan yang disebabkan koreksi kurang nilai perolehan HBM, perubahan kategori, perubahan tanggal PIS, penghapusan aset, dan aset yang dalam proses penghapusan.

4. Akumulasi Penyusutan Aset Hulu Migas/KKKS Pada BPMA

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang berasal dari HBM dan HBI sebesar Rp6.530.194.618.480.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang berasal dari HBM

Saldo Awal 1 Januari 2023	**6.382.780.985.003**
Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan:	**203.116.942.296**
Transfer Masuk Saldo Awal dari UAKPA-PB	
Penyusutan Tahun Berjalan	200.793.980.616
Koreksi Tambah	2.322.961.680
Mutasi Kurang :	**56.763.550.885**
Koreksi kurang	56.763.550.885
Koreksi saldo awal Kurang	-
Saldo Akhir 31 Desember 2023	**6.529.134.376.414**

1. Saldo awal yang disajikan sebesar Rp6.382.780.985.003 merupakan saldo awal per tanggal 31 Desember 2022 Audited.
2. Mutasi tambah sebesar Rp200.793.980.616 merupakan penyusutan tahun berjalan.
3. Koreksi tambah sebesar Rp2.322.961.680 merupakan koreksi penyusutan tahun berjalan;
4. Mutasi Kurang sebesar Rp56.763.550.885 merupakan koreksi kurang;
5. Saldo akhir 31 Desember 2023 sebesar Rp6.529.134.376.414.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang berasal dari HBI

Saldo 1 Januari 2023	**1.367.855.232**
Mutasi Tambah:	**349.784.741**
Transfer Masuk Saldo Awal dari UAKPA-PB	-
Penyusutan Tahun Berjalan	332.105.082
Koreksi Tambah	17.679.659
Mutasi Kurang:	**657.397.907**
Koreksi Kurang	657.397.907
Saldo Akhir 31 Desember 2023	**1.060.242.066**

1. Saldo awal yang disajikan sebesar Rp1.367.855.232 merupakan saldo awal 31 Desember 2022 Audited.
2. Mutasi tambah sebesar Rp349.784.741 disebabkan dari penyusutan tahun berjalan sebesar Rp332.105.082 dan koreksi penyusutan sebesar Rp17.679.659;
3. Mutasi kurang sebesar Rp657.397.907 merupakan koreksi kurang;
4. Saldo akhir 31 Desember 2023 sebesar Rp1.060.242.060.

5. Akumulasi Penyusutan Aset PKP2B

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.589.463.650.617 dan Rp1.535.885.268.820. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Saldo 1 Januari 2023	**1.535.885.268.820**
Mutasi Tambah:	**75.329.994.517**
Penyusutan	66.289.637.403
Koreksi Akm Penyusutan	9.040.357.114
Mutasi Kurang:	**(21.751.612.720)**
Koreksi Non Tanah ke tanah	(21.751.612.720)
Saldo Akhir 31 Desember 2023	**1.589.463.650.617**

Penjelasan atas nilai akumulasi penyusutan aset non tanah yang disajikan dalam Neraca adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal merupakan Akumulasi penyusutan aset non tanah yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2022 sebesar Rp1.535.885.268.820 pada PT Berau Coal.
2. Mutasi tambah Akumulasi penyusutan aset non tanah sebesar Rp75.329.994.517 dengan rincian sebagai berikut:
    a. Penyusutan tahun 2023 pada PT Berau Coal sebesar Rp66.289.637.403.
    b. Koreksi Akumulasi Penyusutan pada PT Berau Coal sebesar Rp9.040.357.114.

3. Mutasi kurang akumulasi penyusutan aset non tanah yaitu koreksi pencatatan atas reklasifikasi BMN Non Tanah ke Tanah pada PT Berau Coal sebesar Rp21.751.612.720.
4. Saldo Akhir 31 Desember 2023 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp1.589.463.649.978 yaitu berasal dari PT Berau Coal.

6. Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp18.495.473.239 dan Rp12.737.115.493. Akumulasi penyusutan aset tersebut sebesar dengan rincian sebagai berikut:

No.	Akun Neraca	Akumulasi Penyusutan Awal	Mutasi 2023	Akumulasi Penyusutan Akhir
1.	Aset Eks PT TLI	12.330.315.493	6.165.157.746	18.495.473.239
2.	Aset GIZ	406.800.000	(406.800.000)	-
	Jumlah	**12.737.115.493**	**5.758.357.746**	**18.495.473.239**

Penjelasan atas mutasi nilai akumulasi penyusutan adalah sebagai berikut:

a. Mutasi tambah sebesar Rp6.165.157.746 adalah nilai Penyusutan Aset eks PT TLI pada Tahun 2023.
b. Mutasi kurang koreksi akumulasi penyusutan pada Aset GIZ sebesar Rp178.400.000 karena telah diserahkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 16/KM.6/KN.5/2021 tentang Hibah Barang Milik Negara Aset Lain-lain pada Pengelola Barang Kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan ditindaklanjuti dengan Naskah Hibah antara Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 20 Oktober 2021.
c. Mutasi kurang koreksi akumulasi penyusutan pada Aset GIZ sebesar Rp228.400.000 karena telah diserahkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/KM.6/KN.5/2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Keuangan dan ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor BAST-13/KN.5/2021 tanggal 08 Oktober 2021.

D.2.2. KEWAJIBAN

D.2.2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

D.2.2.1.1. UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA

Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp4.536.797.626.051 dan Rp3.916.380.112.882 atau mengalami kenaikan sebesar Rp620.417.513.169 (15,84%). dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Utang PFK BA 999.99 DJPb	932.586.210.358	809.370.991.446	123.215.218.912	15,22
2	Utang PFK BA 999.99 DJKN	887.002.856	273.494.832	613.508.024	224,32
3	Utang PFK BA 999.99 DJPK	3.603.324.412.837	3.106.735.626.604	496.588.786.233	15,98
Jumlah		**4.536.797.626.051**	**3.916.380.112.882**	**620.417.513.169**	**15,84**

1. UTANG PFK BA 999.99 DJPb

Utang Perhitungan Fihak Ketiga DJPB per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp932.586.210.358 dan 809.370.991.446, rincian Utang PFK Pegawai sebagai berikut:

No	Badan Penyelenggara	Akun	Nilai (Rp)	
			31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	BPJS Kesehatan	211111, 211112, 211116, 211117, 211118, 211119, & 211121	810.479.628.369	743.361.910.994
2	Perum BULOG	211113	-	2.772.212
3	PT Taspen (Persero)	211114	121.484.623.448	61.290.354.601
4	PT Asabri (Persero)	211151	197.192.160	158.273.803
5	BAPERTARUM-PNS	211115, 211152, 211153, & 211154	424.766.381	4.557.679.836
Jumlah			**932.586.210.358**	**809.370.991.446**

Saldo Utang PFK Pegawai di atas diperoleh dari saldo awal Utang PFK Pegawai Bulan Januari 2023 ditambah penerimaan dana PFK Pegawai sampai dengan Bulan Desember 2023 dikurangi pembayaran dana PFK Pegawai sampai dengan Bulan Desember 2023. Apabila Badan Penyelenggara menerima kelebihan penerimaan pada tahun anggaran berjalan (tahun lalu), maka saldo utang (awal utang) ikut diperhitungkan dengan saldo 118122 berjalan (tahun lalu). Pelunasan atas piutang Akun 118122 tahun lalu menggunakan akun 811921 di tahun berjalan juga turut diperhitungkan dalam komponen penerimaan penambah saldo Utang PFK 2023.

2. UTANG PFK BA 999.99 DJKN

Utang Perwalian/PFK Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL pos penerimaan hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah eks Bank Dalam Likuidasi Utang PFK Per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp887.002.856 dan Rp273.494.832.

3. UTANG PFK BA 999.99 DJPK

Utang Perhitungan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp3.603.324.412.837 dan Rp3.106.735.626.604. Utang PFK tersebut merupakan Hak daerah atas penerimaan Pajak Rokok yang akan disetorkan pada periode penyetoran triwulan berikutnya Tahun Anggaran 2024. Penyetoran periode Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan berdasarkan data penerimaan yang disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

	Keterangan	Nominal	
a.	Saldo awal tahun 2023 (Utang PFK tahun 2022)		3.106.735.626.604
b.	Penerimaan Tahun 2023		21.216.282.180.842
c.	Penyetoran Utang Saldo PFK Tahun 2022	(3.106.735.626.604)	
	Penyetoran Triwulan I	(5.468.922.527.843)	
	Penyetoran Triwulan II	(4.654.015.465.061)	
	Penyetoran Triwulan III	(4.080.647.806.059)	
	Penyetoran Triwulan IV	(3.409.371.969.042)	
	Total		(20.719.693.394.609)
d.	Hak Daerah yang akan disetorkan pada periode berikutnya setelah Pemda memenuhi persyaratan		3.603.324.412.837

Rincian utang Pajak Rokok TA 2023 per pemda, sebagaimana tercantum pada Lampiran LD25.

D.2.2.1.2. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp153.795.462.145.737 dan Rp111.016.588.119.672 atau mengalami kenaikan sebesar Rp42.778.874.026.065 (38,53%).

Rincian utang kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

No.	Instansi	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1.	(BA 999.00)	128.907.360.569	247.752.918.368	(118.845.557.799)	(47,97)
2.	(BA 999.03)	674.852.747	109.925.186	564.927.561	513,92
3.	(BA 999 05)	66.515.508.256.604	25.139.730.218.560	41.375.778.038.044	164,58
4.	(BA 999.08)	73.779.210.341.878	71.536.103.327.320	2.243.107.014.558	3,14
5.	(BA 999.99)	13.752.893.343.901	14.288.902.064.342	(536.008.720.441)	(3,75)
Jumlah		**154.177.194.155.699**	**111.212.598.453.776**	**42.964.595.701.923**	**38,63**
Eliminasi		**(381.732.009.962)**	**(196.010.334.104)**	**(185.721.675.858)**	
Jumlah Bersih		**153.795.462.145.737**	**111.016.588.119.672**	**42.778.874.026.065**	**38,53**

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga terdapat pada:

D.2.2.1.2.1. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA BA 999.00

Jumlah Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp128.907.360.569 dan Rp247.752.918.368 yang mengalami penurunan sebesar Rp118.845.557.799 atau turun 47,97 persen. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek pada Unit Akuntansi Keuangan Kuasa BUN Pusat adalah Utang kepada Pihak Ketiga berupa utang dari Retur SP2D, utang yang berasal dari penerimaan reklasifikasi kelebihan setoran UP pada satker Pengembalian SAL, Kelebihan Pelimpahan Bank/Pos Persepsi, utang dari adanya kesalahan perbankan, dan utang invoice yang berasal dari SPM yang belum SP2D.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari:

No.	Utang	Jumlah	Penjelasan
1	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191)	128.723.421.130	1. Utang retur SP2D di KPPN selaku Kuasa BUN sebesar Rp128.419.063.806. 2. Utang yang berasal dari penerimaan reklasifikasi kelebihan setoran uang persediaan yang belum diterbitkan SPM pengembalian pendapatannya pada satker pengembalian penerimaan negara atas beban SAL sebesar Rp304.357.324.
2	Utang Jangka Pendek sementara karena kesalahan Sistem Perbankan (219944)	46.018.590	1. Kesalahan perbankan atas SP2D nomor 230162414000227 yang telah diselesaikan di bulan Januari 2024 sebesar Rp45.418.590. 2. transaksi setoran langsung ke RPKBUNP SPAN BNI dengan keterangan 6013010858821003 00000000000011255043288 pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp600.000.
3	Pengeluaran non anggaran pihak ketiga yang masih harus dibayar (212145)	7.750.000	Pengeluaran transito yang masih harus dibayar pada KPPN Ambon.
4	Utang Jangka Pendek Lain-lain (219913)	130.170.849	Kelebihan pelimpahan pelimpahan Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya yang belum selesai dilakukan kompensasi per 31 Desember 2023
Jumlah		**128.907.360.569**	

Rincian utang pihak ketiga pada BA 999.00 tersaji dalam Lampiran LD25a

D.2.2.1.2.2. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA BA 999.03

Nilai kewajiban jangka pendek pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp674.852.747 dan Rp109.925.186. Nilai tersebut merupakan kewajiban kepada penyedia jasa upgrade/renovasi aset yang mana hasil pekerjaan upgrade/renovasinya telah diterima oleh LMAN namun belum dilakukan pembayaran.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari:

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pengawasan upgrade Aset eks HTBI di Danadyaksa Cikini	2.453.000	2.453.000
Perencanaan upgrade Aset eks PPA di Puri Casablanca tahap III	-	37.416.500
Pengawasan upgrade Aset eks PPA di Puri Casablanca tahap I	1.877.150	1.877.150
Pengawasan upgrade 3 unit Apartemen Hayam Wuruk	-	3.943.282
Konstruksi dan konsultan pengawas upgrade Aset eks PPA di Apartemen Mitra Bahari	-	64.235.249
Konstruksi dan konsultan pengawas upgrade Aset eks PPA di Puri Casablanca tahap IV	7.569.400	-
Konstruksi dan konsultan pengawas upgrade Aset eks BPPN di Graha Famili Surabaya	6.589.759	-
Pembangunan pagar di community area Kilang Arun	4.990.000	-
Konstruksi dan konsultan pengawas upgrade Aset eks HTBI di Ruko Duta Harapan Indah	155.141.903	-
Konstruksi & pengawas upgrade Aset eks PPA di Ruko Klender	156.943.088	-
Konstruksi & pengawas upgrade Aset eks HTBI di Ruko Beteng Plaza Solo	118.083.373	-
Konstruksi & pengawas upgrade Aset eks PPA di Puri Casablanca tahap V	221.205.074	-
	674.852.747	**109.925.181**

D.2.2.1.2.3. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA BA 999.05

Utang kepada Pihak Ketiga dalam LKBUN 99905 adalah utang/kewajiban yang terjadi akibat kebijakan penyaluran Dana Bagi Hasil secara nontunai dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* (TDF). TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi pemerintah daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran Transfer ke Daerah nontunai berupa penyimpanan dana overnight pada rekening lain Bank Indonesia TDF-TKD Pemda di Bank Indonesia.

Total Utang kepada pihak ketiga pada LKBUN 99905 adalah sebesar Rp66.515.508.256.604. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2022, utang pihak ketiga mengalami peningkatan sebesar Rp41.375.778.038.044 dari yang sebelumnya sebesar Rp25.139.730.218.560. Peningkatan kewajiban tersebut dikarenakan terdapat penyaluran kurang bayar DBH pada tahun 2023 kepada daerah secara nontunai melalui mekanisme TDF berdasarkan KMK 38/KM.7/2023. Utang kepada pihak ketiga terdiri dari utang penyaluran pokok DBH yang disimpan pada rekening TDF TKD sebesar Rp66.498.332.128.500 dan utang penyaluran remunerasi DBH yang disimpan pada rekening TDF TKD, RKUN dan RPKBUNP sebesar Rp17.176.128.104, yang tersimpan pada rekening TDF TKD sebesar

Rp6.171.549.739, pada Rekening RKUN sebesar Rp7.303.125.510 dan pada rekening RPKBUNP sebesar Rp3.701.452.855.

Terdapat 4 (empat) pemda yang melakukan penarikan TDF-TKD pada tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp686.726.766.950 dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini.

Nama Daerah	Penarikan 1 (29/12/2023)
Kab. Siak	39.441.975.000
Provinsi Kepulauan Riau	252.856.859.000
Kab. Natuna	242.061.577.000
Kab. Kepulauan Anambas	152.366.355.950
Total	**686.726.766.950**

Rincian utang pihak ketiga TDF pada BA 999.05 tersaji dalam Lampiran LD25b.

D.2.2.1.2.4. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA BA 999.08

Saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp73.779.210.341.878 dan Rp71.536.103.327.320. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

(dalam rupiah)

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Kementerian Sekretariat Negara	1	-
015	Kementerian Keuangan	61.611.677.143.451	69.306.159.273.984
	MPP Kartu Prakerja	3.792.394.157	2.208.507.330.001
	SKK Migas	30.010.238.382	21.436.723.335
	Dit. Distribusi dan Cadangan Pangan	12.133.730.565.887	-
	Total	**73.779.210.341.878**	**71.536.103.327.320**

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga terdapat pada:

1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp1, yaitu Sekretariat Wakil Presiden sebesar Rp1 merupakan saldo LS bendahara yang tidak dapat disetorkan pengembalian belanjanya ke Kas Negara karena dalam pecahan desimal.

2. KEMENTERIAN KEUANGAN

Saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2023 pada Kementerian Keuangan sebesar Rp61.611.677.143.451 yang terdiri dari:

No	Uraian Entitas	31 Desember 2023
1	ICSID Sekretariat Jenderal	3.397.351.950
2	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua	14.217.330.727
3	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua Barat	10.643.346.890
4	Satker Pengguna Anggaran Dana Kompensasi	61.583.419.113.884
	Jumlah	**61.611.677.143.451**

a. ICSID Sekretariat Jenderal

ICSID Sekretariat Jenderal sebesar Rp3.397.351.950 yang merupakan hasil konversi dari kurs penutup BI per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian		Nilai
1	Pembayaran Tahap III atas Penyedia Jasa Hukum oleh Rajah dan Tann LPP	USD2000x Rp15.439 (Nilai Kurs Penutup BI per 31 Desember 2023)	3.087.800.000
2	PPN	10% x Biaya Pengacara	308.780.000
3	Biaya Transfer valuta asing	USD50 x Rp15.439	771.950
Total Nilai Utang kepada Pihak Ketiga			**3.397.351.950**

Utang kepada Pihak Ketiga tersebut berasal dari biaya pembayaran tahap III atas penyedia jasa hukum sebesar USD200.000 sesuai Perjanjian Penyediaan Jasa Hukum Nomor 1/PPK-ICSID/2014 tanggal 2 Desember 2014 ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai dan biaya transfer yang dihitung berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S- 940/MK.01/2017 tanggal 24 November 2017 hal Usulan Penggunaan Anggaran BA BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain (BA 999.08). Angka tersebut mengalami perubahan nilai dibanding 31 Desember 2022 karena adanya selisih kurs yang digunakan sebagai rujukan transaksi.

b. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua sebesar Rp14.217.330.727 yang merupakan tagihan termin IV kontrak ongkos angkut beras kepada PT Pos Indonesia atas prestasi pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan kontrak nomor KONTR-01/OAB/WPB.34/2023 tanggal 4 April 2023 dan Addendum-03/OAB/WPB.34/2023 tanggal 18 Desember 2023. Utang kepada Pihak Ketiga tersebut telah dibayarkan berdasarkan BAP Nomor BAP-05/OAB/WPB.34/2023 pada tanggal 26 Desember 2023 dan dengan SP2D Nomor 249991304000094 tanggal 4 Januari 2024.

c. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua Barat sebesar Rp10.643.346.890, yang terdiri dari:

1) Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp2.174.168.000 pertama kali dicatat pada Laporan Keuangan Tahun 2018 Audited berdasarkan Putusan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Mnk tanggal 10 September 2015. Utang tersebut merupakan Tagihan biaya Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.174.168.000.

2) Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp8.469.178.890 yang merupakan pengakuan utang atas progress pekerjaan OAB TA 2023 yang belum dilaksanakan pembayarannya dengan mekanisme RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran) sebesar Rp8.469.178.890 dengan melakukan jurnal penyesuaian pada awal tahun 2024 berupa pencatatan utang kepada pihak ketiga.

d. Satker Pengguna Anggaran Dana Kompensasi

Utang kepada Pihak Ketiga pada Satker Pengguna Anggaran Dana Kompensasi sebesar Rp61.583.419.113.884 yang terdiri dari:

1) Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-233/MK.02/2024 tanggal 13 Maret 2024 hal Penetapan Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Bensin (Gasoline) RON 90 Periode Tahun 2023, utang

kompensasi BBM Tahun 2023 pada PT Pertamina Patra Niaga adalah sebesar Rp43.520.357.185.487.

2) Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-232/MK.02/2024 hal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk akibat Penetapan Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar Periode Tahun 2023, utang kompensasi BBM Tahun 2023 pada PT AKR Corporindo, Tbk adalah sebesar Rp232.578.572.757.

3) Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-234/MK.02/2024 hal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT PLN (Persero) akibatPenetapan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2023, utang kompensasi Listrik Periode Tahun 2023 pada PT PLN (Persero) adalah sebesar Rp17.835.197.231.014.

Rincian utang pada Satker Pengguna Anggaran Dana Kompensasi dapat dilihat pada table berikut:

Uraian	awal			koreksi		
	Asersi KPA (BPKP)	Pembayaran trw1-3	Utang Akhir 2023	ITJEN	Pembayaran trw1-3	Utang Akhir 2023
BBM	**126.894.215.606.853**	**83.126.231.143.070**	**43.767.984.463.783**	**126.879.166.901.314**	**83.126.231.143.070**	**43.752.935.758.244**
PPN	**126.263.272.204.708**	**82.727.866.313.682**	**43.535.405.891.026**	**126.248.223.499.169**	**82.727.866.313.682**	**43.520.357.185.487**
Solar	74.185.925.661.764	48.815.436.036.593	25.370.489.625.171	74.170.876.956.225	48.815.436.036.593	25.355.440.919.632
Pertalite	52.077.346.542.944	33.912.430.277.089	18.164.916.265.855	52.077.346.542.944	33.912.430.277.089	18.164.916.265.855
AKR	**630.943.402.145**	**398.364.829.388**	**232.578.572.757**	**630.943.402.145**	**398.364.829.388**	**232.578.572.757**
Solar	630.943.402.145	398.364.829.388	232.578.572.757	630.943.402.145	398.364.829.388	232.578.572.757
Listrik (PLN)	**74.170.899.712.024**	**56.179.082.036.088**	**17.991.817.675.936**	**74.014.279.267.102**	**56.179.082.036.088**	**17.835.197.231.014**
	201.065.115.318.877	**139.305.313.179.158**	**61.759.802.139.719**	**200.893.446.168.416**	**139.305.313.179.158**	**61.588.132.989.258**

Terdapat koreksi Beban dan Utang dana kompensasi BBM hasil pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa yang berwenang yang terdiri dari JBT Solar PT PPN sebesar minus Rp3.553.645.877, JBKP Pertalite PT PPN sebesar minus Rp1.097.944.133 dan JBT Solar PT AKR sebesar minus Rp62.285.363 sehingga Utang kepada Pihak Ketiga pada Satker Pengguna Anggaran Dana Kompensasi sebesar Rp61.583.419.113.884.

2. MANAJEMEN PELAKSANA PROGRAM KARTU PRAKERJA

Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja sebesar Rp3.792.394.157 yang merupakan realisasi dana atas penyelesaian pekerjaan yang dicadangkan pada RPATA yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga pada TA 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir

Tahun Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Pembayaran KAP Tasnim, Ferdiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan dan Rekan termin 12	153.135.600	
2	Pembayaran PT Paragon Pratama Teknologi	199.022.445	
3	Pembayaran PT Telekomunikasi Indonesia Tbk termin 3	50.394.000	
4	Pembayaran PT VADS Indonesia termin 12	2.259.708.629	
5	Pembayaran PT Sosial Teknologi Indonesia termin 12	823.939.983	
6	Pembayaran PT MNC Land Tbk temin 6	306.193.500	
7	Insentif Mencari Kerja		2.181.253.200.000
8	Insentif Survei Evaluasi		27.253.500.000
9	*Top Up*		630.001
Total		**3.792.394.157**	**2.208.507.330.001**

3. SKK MIGAS

SKK Migas sebesar Rp30.010.238.382 yang merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Belanja Lain-Lain yang Masih Harus Dibayar yang merupakan tunggakan yang harus dibayar pada tahun 2024 sebesar Rp2.981.617.041 dan Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya berupa utang atas pekerjaan akhir tahun yang dananya sudah tersedia pada RPATA sebesar Rp27.028.621.341.

4. DIT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

Dit. Distribusi dan Cadangan Pangan sebesar Rp12.133.730.565.887 yang merupakan estimasi kekurangan bayar CPP komoditas beras tahun 2023 atas Kurang Bayar Tahap I, Bantuan Pangan Tahap II, Biaya Distribusi Tahap I dan II, Sisa SPHP TW 1 sd. 3, dan SPHP TW 4 dan Bantuan Bencana Alam. Utang sebesar Rp12.133.730.565.887 tersebut, belum termasuk atas SPHP jagung Tahun 2023 sebanyak 27.631.992 kg jagung di sembilan provinsi.

D.2.2.1.2.5. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA TRANSAKSI KHUSUS BA 999.99

Utang Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp13.371.161.333.939 dan Rp14.092.891.730.238 dengan rincian sebagai berikut:

No	Instansi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Utang Kepada Pihak Ketiga TK – DJPB	132.298.574.491	103.373.291.426
2.	Utang Kepada Pihak Ketiga TK – DJA	13.613.633.419.350	14.183.589.743.957
3.	Utang Kepada Pihak Ketiga TK – DJKN	4.559.988.950	-
4	Utang Kepada Pihak Ketiga TK – BKF	2.401.361.110	1.939.028.959
Jumlah		**13.752.893.343.901**	**14.288.902.064.342**
Eliminasi		**(381.732.009.962)**	**(196.010.334.104)**
Total		**13.371.161.333.939**	**14.092.891.730.238**

a. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA TK – DJPB

Utang Kepada Pihak Ketiga DJPB sebesar Rp132.298.574.491, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Utang IJP Bank/Pos Persepsi (termasuk Utang IJP rampung 2022)	45.085.084.000
2	Utang PPN RTGS/Swift Bank pada BI s.d Feb 2023	529.000.281
3	Utang Imbal Jasa Kustodian Des 23	31.247.240
4	Utang PPN BO Des 23	21.932.570
5	Utang BO Valas BRI Des 23	40.800.000
6	Utang BO Valas Citibank Des 23	52.150.000
7	Utang Bunga Negatif Des 23	1.971.930
8	Kekurangan Pencairan Dana Iuran Jaminan Kesehatan TW IV 23 BPJS	79.801.003.091
9	Kekurangan Belanja Pensiun Bulan Desember 2023 Taspen	518.532.850
10	Kekurangan pensiun program penyesuaian pensiun Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) Triwulan IV 2023	1.553.676.962
11	Utang kepada pihak ketiga karena kesalahan penyetoran oleh pihak ketiga tersebut	1.000.000
12	Utang kekurangan JKK TW IV 2023 Taspen	1.165.543.892
13	Utang kekurangan JKm TW IV 2023 Taspen	3.496.631.675
Jumlah		**132.298.574.491**

b. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA TK – DJA

Utang Kepada Pihak Ketiga DJA sebesar Rp13.613.633.419.350 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2023
1.	Utang Kepada Pihak Ketiga Migas	10.807.330.069.114
2	Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi	2.806.303.350.236
Jumlah		**13.613.633.419.350**

1) Utang Kepada Pihak Ketiga Migas

Utang Kepada Pihak Ketiga Migas merupakan kewajiban kontraktual pemerintah terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha hulu Migas. Jumlahnya yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp10.807.330.069.114. Sumber dana pembayaran kewajiban kontraktual tersebut berasal dari penerimaan migas pada Rekening Migas Nomor 600.000411980. Adapun rincian utang kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	PBB Migas	-	-
2.	Reimbursement PPN	979.144.019.592	-
3.	Pajak Air Tanah dan Air Permukaan	-	-
4	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	1.296.393.971	6.203.805.865
5	DMO Fee KKKS	1.445.305.862.052	1.634.482.801.835
6	Utang Underlifting KKKS	8.113.018.240.965	9.520.469.965.562
7	Utang Fee Penjualan Migas	268.565.552.534	837.483.225.638
Jumlah		**10.807.330.069.114**	**11.998.639.798.900**

Kurs JISDOR per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.439.

1. PBB Migas

   Pada Laporan Keuangan tahun 2023 ini tidak terdapat saldo utang yang berasal dari PBB Migas. Total tagihan awal PBB Migas tahun 2023 adalah nihil, sedangkan total tagihan yang dapat diproses pembayarannya setelah melalui tahap verifikasi dan proses pengembalian tagihan oleh Ditjen Anggaran serta penagihan kembali oleh Ditjen Pajak adalah sebesar Rp10.634.943.104.826. Dari total tagihan yang dapat dibayarkan tersebut, penyelesaiannya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dan melalui proses pemindahbukuan dari Rekening Migas Ke RKUN.

2. *Reimbursement* PPN

   Mekanisme pembayaran reimbursement PPN mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. KKKS menagihkan reimbursement PPN kepada SKK Migas untuk diverifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, selanjutnya SKK Migas meneruskan tagihan kepada Kementerian Keuangan (dhi. Direktur Jenderal Anggaran).

   Rincian utang reimbursement PPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp979.144.019.592 dan Rp0, adalah sebagai berikut:

No	KKKS	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	BOB PT. BSP – Pertamina Hulu	11.262.740.833	-
2	Medco E&P Grissik Ltd	81.928.304.495	-
3	Medco E&P Natuna Ltd	561.629.792.040	-
4	JOB. PERT-MEDCO E&P TOMORI SULAWESI	18.811.841.919	-
5	EXXON MOBIL CEPU LTD	56.105.824.748	-
6	PETROCHINA INT'L BANGKO LTD	1.025.430.962	-
7	PETROCHINA INT'L JABUNG LTD	2.488.689.710	-
8	PT. MEDCO E&P INDONESIA	20.485.386.365	-
9	PT. MEDCO E&P RIMAU	6.278.811.245	-
10	Medco Energi Madura Offshore Pty. Ltd.	21.594.924.282	-
11	STAR ENERGY (KAKAP) LTD	13.168.975.127	-
12	ENI MUARA BAKAU B.V.	169.058.490.127	-
13	Medco Energi Bangkanai Limited	11.660.073.122	-
14	PT. TROPIK ENERGI PANDAN	902.895.832	-
15	PT. SELERAYA BELIDA	2.741.838.785	-
Jumlah		**979.144.019.592**	**-**

Saldo Utang Reimbursement PPN sebesar Rp979.144.019.592 tersebut telah diselesaikan seluruhnya pada bulan Januari 2024.

3. Pajak Air Tanah dan Air Permukaan

Pajak Air Tanah dan Air Permukaan merupakan salah satu pajak daerah yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat sebagai implementasi assumed and discharged yang diatur dalam PSC.

Mekanisme penyampaian tagihan permintaan pembayaran Pajak Air Tanah dan Air Permukaan dan kelengkapan dokumen penagihan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas Yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.02/2017.

Pembayaran Pajak Air Tanah dan Air Permukaan untuk kegiatan usaha hulu migas melalui Rekening Migas Nomor 600.000411.980 pada Bank Indonesia, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.02/2021. Per 31 Desember 2023 tidak ada saldo atas Pajak Air Tanah dan Air Permukaan.

Sepanjang periode tahun 2023 tidak terdapat tagihan Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Air Tanah (PAT) dari SKK Migas atau BPMA. Hal ini salah satunya disebabkan karena belum adanya ketentuan terkait pedoman/tata cara perhitungan besaran NPA Tanah untuk kegiatan usaha hulu Migas, yang sedang disusun oleh Kementerian ESDM dan nantinya menjadi dasar bagi Pemda dalam menetapkan besaran NPA Tanah.

Sebagai informasi, besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak (NPA Tanah) dengan tarif dan realisasi pemanfaatan air tanah.

4. Pajak Penerangan Jalan

Seperti halnya Pajak Air Tanah dan Air Permukaan, Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas juga merupakan pajak daerah yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat sebagai implementasi assumed and discharged yang diatur dalam PSC. Demikian pula halnya dengan mekanisme penyampaian tagihan dan kelengkapan dokumen penagihan serta mekanisme pembayarannya mengacu kepada ketentuan yang berlaku pada Pajak Air Tanah dan Air Permukaan.

Berikut rincian saldo utang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.296.393.971 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.203.805.865 dengan rincian sebagai berikut:

No	Daerah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Kab. Musi Rawas	80.423.862	-
2	Kab. Banggai	892.389.134	-
3	Kab. Pali	323.580.975	-
4	Kab. Papua Barat	-	5.955.617.782
5	Kab. Barito Utara	-	37.077.712
6	Kab. Tuban	-	211.110.371
Jumlah		**1.296.393.971**	**6.203.805.865**

Saldo Utang Pajak Penerangan Jalan Non PLN Rp1.296.393.971 tersebut telah diselesaikan seluruhnya pada bulan Januari 2024.

5. DMO Fee KKKS

Mekanisme pembayaran DMO Fee kepada KKKS mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Pembayaran *Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting Kontraktor* dan/ atau Under Lifting Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. KKKS menagihkan DMO Fee kepada SKK Migas untuk diverifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, selanjutnya SKK Migas melakukan penagihan kepada Kementerian Keuangan (d.h.i Direktur Jenderal Anggaran). Berikut ini adalah rincian dari Utang DMO Fee per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar USD93,613,955.70 ekuivalen Rp1.445.305.862.052 dan USD104,828,297 atau setara dengan Rp1.634.482.801.835.

Nilai Saldo Akhir Utang DMO Fee sebesar USD93,613,955.70 telah seluruhnya diselesaikan pada bulan April 2024.

6. Utang *Underlifting* KKKS

Underlifting KKKS adalah kekurangan pengambilan minyak dan/atau gas bumi oleh kontraktor apabila dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama pada periode tertentu. Saldo utang per 31 Desember 2023 adalah sebesar USD525,488,583.52 atau setara dengan Rp8.113.018.240.965, sedangkan saldo utang per 31 Desember 2022 adalah sebesar USD610,599,664.29 atau setara dengan Rp9.520.469.965.562. Terhadap Utang atas underlifting KKKS dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Per 31 Desember 2023, dapat disampaikan terdapat nilai *outstanding* utang underlifting dari 2 KKKS yang tidak mengalami perubahan karena belum adanya realiasi tagihan yang disampaikan kepada Pemerintah. Kedua KKKS tersebut, yaitu *Energy Equity Epic* (Sengkang) Pty Ltd dan PHE NSO, nilai *outstanding* utang underlifting disebabkan oleh adanya permasalahan dalam proses penyelesaian hak dan kewajiban Kontraktor kepada Pemerintah yang masih menunggu proses penyelesaian;
b. Dari saldo akhir underlifting sebesar USD525,488,584.52 seluruhnya nilai estimasi underlifting terdiri dari nilai estimasi underlifting tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar USD23,603,708.52 dan USD501,884,875.

7. Utang Fee Penjualan Migas

Utang fee penjualan Migas merupakan kewajiban Pemerintah sektor hulu migas yang berasal dari tagihan fee atas penjualan migas bagian negara yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) yang telah diverifikasi, diteliti dan disepakati bersama antara DJA dan SKK Migas. Pada 31 Desember 2023 terdapat saldo utang fee penjualan migas sebesar USD17,395,268.64 atau ekuivalen sebesar Rp268.565.552.534 menggunakan kurs JISDOR per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.439. Sedangkan pada tahun 2022, saldo Utang Fee Penjualan Migas adalah sebesar USD53,712,367 atau ekuivalen sebesar Rp837.483.225.639 menggunakan kurs JISDOR per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.592.

Utang Fee Penjualan Migas tersebut merupakan fee penjualan Minyak Mentah dan

Kondensat Bagian Negara (MMKBN) periode April-September 2023 yang dihitung berdasarkan kriteria dan besaran tarif imbalan (fee) penjualan yang ditentukan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 7.K/MG.05/MEM.M/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 21.K/MG.05/MEM.M/2022. Atas Utang Fee Penjualan MMKBN periode April-September dimaksud telah dilakukan permintaan pembayarannya melalui nota dinas Direktur Jenderal Anggaran nomor ND-891/AG/2023 tanggal 28 Desember 2023 dan telah diterbitkan SP2D nomor 249992804000001 pada tanggal 3 Januari 2024.

b. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA PANAS BUMI

Utang kepada pihak ketiga panas bumi adalah dana yang tersedia di rekening panas bumi yang dialokasikan sebagai pencadangan untuk pengembalian (reimbursement) PPN panas bumi, pencadangan pembayaran PBB panas bumi, dan pencadangan penggantian bonus produksi panas bumi.

Pada Neraca, diakui adanya utang pihak ketiga diestimasi, yaitu pada saat pencadangan utang kepada Pengusaha (reimbursement PPN dan penggantian bonus produksi) dan pencadangan pembayaran PBB panas bumi dalam rekonsiliasi triwulanan. Adapun utang pihak ketiga reimbursement PPN dan utang pihak ketiga PBB panas bumi diakui pada saat pengajuan tagihan dari pihak ketiga, sedangkan utang pihak ketiga penggantian bonus produksi diakui pada saat diterbitkannya Kepmen ESDM tentang besaran bonus produksi panas bumi.

Utang kepada Pihak Ketiga Panas Bumi per 31 Desember 2023 tersaji sebesar Rp2.424.571.340.274 terdiri dari utang pihak ketiga panas Bumi sebesar Rp2.806.303.350.236 ditambah eliminasi sebesar minus Rp381.732.009.962.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Panas Bumi per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi-reimbursement PPN *	661.796.767.489	517.482.177.628
2	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi-PBB Panas bumi	-	-
3	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi-penggantian bonus produksi **	72.023.814.631	55.629.004.186
4	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi diestimasi- reimbursement PPN *	1.260.189.088.463	1.094.461.665.255
5	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi diestimasi- PBB	430.561.669.691	321.366.763.884
6	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi diestimasi - penggantian bonus produksi	-	-
7	Bagian pemerintah dari penerimaan panas bumi yang belum dipindahbukukan	381.732.009.962	196.010.334.104
Total (1+2+3+4+5+6+7)		**2.806.303.350.236**	**2.184.949.945.057**
Eliminasi		**(381.732.009.962)**	**(196.010.334.104)**
Total Akhir		**2.424.571.340.274**	**1.988.939.610.953**

c. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA TK – DJKN

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.559.988.950 dan Rp0. Saldo tersebut merupakan hasil reviu tim BPKP untuk tagihan periode Oktober 2023 melalui surat nomor PE.12.03/S-144/D1/01/2024 tanggal 15 Maret 2024 dengan nilai sebesar Rp3.494.341.644 dan pengakuan kewajiban atas konfirmasi tagihan penggantian biaya margin IP PEN yang diusulkan Pelaksana Investasi untuk bulan November dan Desember 2023 sebesar Rp1.065.647.306.

d. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA TK – BKF

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.401.361.110 dan Rp1.939.028.959. Besaran nilai utang kepada pihak ketiga dalam rupiah meningkat dikarenakan perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (EUR dan USD).

Pada laporan keuangan terdapat saldo awal utang jangka pendek yang disebabkan oleh kekurangan pembayaran kontribusi dan *trust fund* akibat selisih kurs karena pagu anggaran yang tidak mencukupi dan/atau karena terdapat pengurangan nilai pembayaran yang diterima oleh pihak Organisasi Internasional (OI) akibat adanya biaya transfer bank (*bank charges*).

Pada saldo awal utang jangka pendek yang berasal dari ISFD, GCF, dan APTCF berasal dari akumulasi kurang bayar akibat selisih kurs antara anggaran dan pada saat pembayaran sehingga mengakibatkan kurangnya pagu anggaran saat pembayaran. Sedangkan, pada saldo awal utang jangka pendek yang berasal dari OI lainnya diakibatkan adanya pengurangan nilai pembayaran yang diterima oleh pihak OI akibat adanya biaya transfer bank (*bank charges*).

Selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, terdapat beberapa Organisasi Internasional yakni OFID, GGGI, APTERRR dan TCF IAEA yang telah memberikan konfirmasi bahwa tidak ada tagihan utang yang akan diberikan kepada Pemerintah Indonesia. Adanya konfirmasi dari OFID, GGGI, APTERRR dan TCF IAEA dapat menjadi bukti yang cukup untuk menghapuskan Utang Jangka Pendek kepada OI tersebut.

Selain itu, masih terdapat beberapa OI yakni ISFD, GCF, AMTF dan APTCF yang telah menyampaikan konfirmasi bahwa Pemerintah Indonesia diminta untuk melunasi Utang tersebut. Pelunasan utang pada Kewajiban utang jangka pendek pada ISFD dan GCF telah dibayarkan pada bulan Agustus tahun 2023. Berdasarkan hasil konfirmasi dari AMTF, terdapat koreksi jumlah utang jangka pendek dari yang semula tercatat USD65 menjadi USD55, atas kewajiban utang jangka pendek tersebut akan ditagihkan kepada Pemerintah Indonesia pada tahun 2024. Kemudian untuk pembayaran kewajiban jangka pendek pada APTCF akan diusulkan untuk dibayarkan pada tahun 2024.

Pada tahun 2023 juga terdapat dua penambahan utang baru yaitu utang kepada SOMTC *Trust Fund to Support Emergency Humanitarian and Relief Efforts in the Event of the Irregular Movement of Persons in Southeast Asia* sebesar USD10 yang disebabkan adanya biaya transfer bank (*Bank Charge)* serta utang kepada *Pandemic Prevention, Preparedness and Response* (PPR) *Financial Intermediary Fund* (FIF) atau disingkat *Pandemic Fund* sebesar USD155.000, akibat adanya

perbedaan (selisih) kurs pada saat perencanaan anggaran dan realisasi pembayaran.

Rincian Utang Jangka Pendek TK BKF per 31 Desember 2023 disajikan pada dalam Lampiran LD25c

D.2.2.1.3. UTANG BUNGA

Jumlah Utang Bunga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp112.693.785.312.937 dan Rp97.401.735.689.433 atau mengalami kenaikan sebesar Rp15.292.049.623.504 (15,70%) disebabkan karena meningkatnya *outstanding* utang.

Utang Bunga terdiri dari Utang Bunga Instrumen Pinjaman dan SBN per 31 Desember 2023 sebesar Rp112.693.785.312.937 yang terdiri dari Utang Bunga Luar Negeri sebesar Rp14.084.429.640.806, Utang Bunga Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp494.312.527.035 dan Utang Bunga SBN sebesar Rp98.115.043.145.096, sebagai berikut:

Uraian	Utang Biaya Pinjaman 31 Desember 2023	Utang Biaya Pinjaman 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Bunga Luar Negeri	14.084.429.640.806	5.593.565.712.511	8.490.863.928.295	151,80
Utang Bunga Pinjaman Dalam Negeri	494.312.527.035	150.623.558.002	343.688.969.033	228,18
Utang Bunga SBN	98.115.043.145.096	91.657.546.418.920	6.457.496.726.176	7,05
Jumlah	**112.693.785.312.937**	**97.401.735.689.433**	**15.292.049.623.504**	**15,70**

a. Utang Bunga Luar Negeri Tahun 2023 sebesar Rp14.084.429.640.806 dengan rincian:

Uraian	Jumlah	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Utang Bunga Pinjaman Program	8.693.777.637.505	3.231.531.081.596
Utang Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program	9.889.419.726	9.810.121.334
Utang Bunga Pinjaman Proyek	5.233.829.803.446	2.201.922.166.211
Utang Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek	146.932.780.129	150.302.343.370
Jumlah	**14.084.429.640.806**	**5.593.565.712.511**

b. Utang Bunga Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2023 sebesar Rp494.312.527.035.

c. Utang Bunga SBN Tahun 2023 sebesar Rp98.115.043.145.096 meningkat Rp6.457.496.726.176 (7,05%) dibanding Utang Bunga SBN Tahun 2022 sebesar Rp91.657.546.418.920 disebabkan karena meningkatnya *outstanding* SBN. Utang Bunga SBN Tahun 2023 di dalamnya termasuk penerimaan utang bunga obligasi negara rupiah, penerimaan imbalan diterima di muka SBSN Jangka Panjang dan penerimaan utang bunga obligasi negara-valuta asing yang belum dibayarkan sebesar Rp1.027.382.710.685.

D.2.2.1.4. UTANG SUBSIDI

Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2023 sebesar Rp27.848.746.955.563. Jumlah Utang Subsidi tersebut, Rp12.615.644.683.999 (82,82%) lebih besar dari Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.233.102.271.564. Jumlah utang subsidi berubah disebabkan tambahan tagihan triwulan IV dan kekurangan SBP PT PGE Tahun 2019-2020 sesuai audit BPKP dengan jumlah keseluruhan Rp894.849.685.125 kemudian koreksi atas penyajian utang dan beban di beberapa jenis subsidi, yaitu subsidi pupuk, PSO Kereta Api, dan energi serta reklasifikasi Utang Jangka Panjang karena kebijakan akuntansi untuk pengakuan awal utang adalah sebagai kewajiban jangka pendek.

Terdapat Utang Subsidi Estimasi dikarenakan terdapat tagihan-tagihan yang telah disampaikan oleh BUMN Operator/Bank/Lembaga Penyalur kepada KPA, namun KPA belum melakukan verifikasi atas tagihan dimaksud, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan.

Rincian Utang Subsidi per Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2023 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

NO.	K/L	JUMLAH		Kenaikan/ (Penurunan)	%
		31 Desember 2023	31 Desember 2022		
1	Keuangan	13.744.959.186.456	2.177.773.329.663	11.567.185.856.793	531,15
2	Perhubungan	1.544.109.295.439	560.887.183.498	983.222.111.941	175,30
3	PUPR	602.874.649.812	454.467.613	602.420.182.199	132555,14
4	KUKM	2.112.882.040.781	12.493.964.459.630	(10.381.082.418.849)	(83,09)
5	Perdagangan	22.831.160	22.831.160	-	-
6	Pertanian	9.843.898.951.915	-	9.843.898.951.915	-
	Jumlah	**27.848.746.955.563**	**15.233.102.271.564**	**12.615.644.683.999**	**82,82**

1. UTANG SUBSIDI KEMENTERIAN KEUANGAN

Saldo Utang Subsidi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp13.744.959.186.456 dan Rp2.177.773.329.663. Utang subsidi per 31 Desember 2023 merupakan nilai penyaluran subsidi yang belum dibayar.

Rincian Utang Subsidi per satker lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2023 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Utang Subsidi	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DJA	11.103.565.148.217	2.089.390.848.390	9.014.174.299.827	431,4
DJPPR	-	88.343.565.059	(88.343.565.059)	(100)
DJPB	-	38.916.214	(38.916.214)	(100)
DJP	2.641.394.038.239	-	2.641.394.038.239	100
Total	**13.744.959.186.456**	**2.177.773.329.663**	**11.567.185.856.793**	**531,15**

a. DJA

Utang subsidi pada satker Ditjen Anggaran sebesar Rp11.103.565.148.217 yang merupakan kewajiban pemerintah yang masih harus dibayar atas pelaksanaan PSO yang berupa penyediaan

JBT, LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain, Utang subsidi diakui pada saat berita acara verifikasi atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan oleh KPA BUN. Pengelolaan Belanja Subsidi berdasarkan hasil rekonsiliasi data dengan unit teknis yang telah diverifikasi oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi.

Sampai dengan 31 Desember 2023, utang subsidi yang dapat diakui adalah sebesar Rp11.103.565.148.217 yang terdiri atas:

1) Kekurangan Subsidi JBT Minyak Solar Tahun 2023 kepada PT Pertamina Patra Niaga sesuai asersi KPA sesuai BA Pemeriksaan BPK RI sebesar Rp1.940.175.173.857
2) Kekurangan Subsidi JBT Minyak Solar Tahun 2023 kepada PT AKR Corporindo Tbk sesuai asersi KPA sesuai BA Pemeriksaan BPK RI sebesar Rp15.755.628.392
3) Kekurangan Subsidi JBT Minyak Tanah Tahun 2023 kepada PT Pertamina Patra Niaga sesuai BA Pemeriksaan BPK RI (termasuk PPN) sebesar Rp478.022.606.108
4) Kekurangan Subsidi LPG Tabung 3 Kg Tahun 2023 kepada PT Pertamina Patra Niaga sesuai asersi KPA sesuai BA Pemeriksaan BPK RI (termasuk PPN) sebesar Rp4.057.811.293.748
5) Kekurangan subsidi listrik kepada PT PLN (Persero) Tahun 2023 sesuai asersi KPA sesuai BA Pemeriksaan BPK RI sebesar Rp4.611.800.446.113

b. DJPPR

Utang subsidi jangka pendek IJP pada Satker DJPPR 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp88.343.565.059.

c. DJPB

Utang Subsidi Jangka Pendek Subsidi Kredit Program pada Satker DJPB 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp38.916.214.

d. DJP

Utang subsidi pada satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp2.641.394.038.239 yang terdiri dari tagihan Subsidi PPh DTP Panas Bumi tahun 2023 sebesar Rp917.820.311.039, PPh DTP SBN Valas tahun 2023 sebesar Rp323.169.474.517, tambahan tagihan triwulan IV dan kekurangan SBP PT PGE Tahun 2019-2020 dengan jumlah keseluruhan Rp894.849.685.125.

Selain itu. terdapat pula Utang Subsidi tahun 2023 yang berasal dari tagihan Subsidi PPN DTP atas penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan/atau KBL Bus Tertentu kepada pembeli (PPN DTP KBLBB) tahun 2023 yang telah terverifikasi namun belum dibayarkan sebesar Rp505.554.567.558.

2. UTANG SUBSIDI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Nilai Utang Subsidi Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.544.109.295.439 dan Rp560.887.183.498.

Rincian Utang Subsidi eselon I lingkup Kementerian Perhubungan per 31 Desember 2023 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Nama	Saldo
Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan	1.210.648.135.016
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan	333.461.160.423
Total	**1.544.109.295.439**

a. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan

Nilai utang subsidi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp385.818.521.823 yang dimasukkan dalam laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 (Audited) serta terdapat koreksi kurang atas PSO Pelni sebesar Rp52.357.361.399 sehingga utang subsidi Ditjen Perhubungan Laut menjadi Rp333.461.160.424.

b. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan

Nilai Utang Subsidi Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp11.595.432.857 terdiri dari:

1) Utang Subsidi PSO Perkeretaapian hasil verifikasi tahunan sebesar Rp9.387.092.782 sesuai Berita Acara Verifikasi Nomor UM.004/1/4/K2/DJKA/2024 tanggal 03 Februari 2024. PSO Eksisting sebesar Rp8.082.397.821 PSO LRT Jabodebek sebesar Rp1.304.694.961 Pengakuan utang subsidi atas PSO Sarana LRT Jabodebek telah memperhitungkan nilai pendapatan non farebox sebesar Rp1.500.000.000.
2) Utang Subsidi Estimasi atas tagihan subsidi Prasarana LRT Jabodebek tahun 2023 yang belum dilakukan verifikasi sebesar Rp2.208.340.075

Terdapat koreksi kurang atas PSO Kereta Api sebesar Rp1.199.052.702.159 sehingga utang subsidi Ditjen Perkeretaapian menjadi Rp1.210.648.135.016.

3. UTANG SUBSIDI KEMENTERIAN PUPR

Saldo Utang Subsidi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp602.874.649.812 dan Rp454.467.613.

Rincian Utang Subsidi per satker lingkup Kementerian PUPR per 31 Desember 2023 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Kode satker	Nama	Saldo
987252	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	601.551.930.162
962718	Direktorat Jenderal Cipta Karya	1.322.719.650
Total		**602.874.649.812**

Utang Subsidi Estimasi (akun 214112) adalah prognosa utang atas tagihan subsidi yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal Pelaporan pada 31 Desember 2023. Utang subsidi sebesar Rp1.322.719.650 pada Ditjen Cipta Karya yang akan dibayarkan pada periode April 2024 sementara belum dibayarkannya tagihan pada Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dikarenakan jumlah anggaran yang tidak cukup.

Terdapat koreksi tambah atas subsidi bunga KPR di BTN sehingga utang subsidi menjadi Rp602.874.649.812

4. UTANG SUBSIDI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Nilai Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp2.112.882.040.781 dan Rp12.493.964.459.630. Terdapat penurunan sebesar Rp10.381.082.418.849 dari Tahun 2022.

Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.112.882.040.781 tersebut merupakan Utang Subsidi berdasarkan tagihan-tagihan IJP KUR dan subsidi bunga/subsidi marjin KUR yang sudah dilakukan verifikasi dan telah terbit Berita Acara Verifikasi.

Rincian Utang Subsidi berdasarkan tagihan-tagihan IJP KUR dan subsidi bunga/subsidi marjin KUR per penyalur tersaji dalam Lampiran LD25d.

5. UTANG SUBSIDI KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Nilai Utang Subsidi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp22.831.160 dan Rp22.831.160

Utang Subsidi adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas pengeluaran pemerintah untuk diberikan kepada perusahaan/lembaga yang menjadi operator subsidi resi gudang atas perintah KPA Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan.

6. UTANG SUBSIDI KEMENTERIAN PERTANIAN

Nilai Utang Subsidi per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.843.898.951.915 yang berasal dari koreksi tambah atas subsidi pupuk karena penyesuaian atas HPP yang masih menggunakan perhitungan tahun 2021 serta reklasifikasi utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek.

D.2.2.1.5. UTANG TRANSFER

Jumlah Utang Transfer per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp52.187.965.129.846 dan Rp49.842.043.112.377. Jika dibandingkan neraca Tahun 2022 Audited, Kewajiban pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.345.922.017.469 atau 4,71% sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Jenis Kewajiban	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kewajiban TKD	200.961.455.619	4.134.863.367.428	(3.933.901.911.809)	(95,14)
Kewajiban TKD Estimasi	51.987.003.674.227	45.707.179.744.949	6.279.823.929.278	13,74
Total	**52.187.965.129.846**	**49.842.043.112.377**	**2.345.922.017.469**	**4,71**

1. KEWAJIBAN TKD

Kewajiban transfer ke Daerah yang disajikan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sejumlah Rp200.961.455.619 dan Rp4.134.863.367.428 atau mengalami penurunan sebesar Rp3.933.901.911.809 (95,14%). Penurunan Kewajiban TKD disebabkan oleh penyelesaian kewajiban DBH sampai dengan tahun anggaran 2022 melalui penerbitan KMK 38/KM.7/2023.

Rincian Kewajiban TKD disajikan pada tabel berikut ini:

Jenis Kewajiban	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
DBH	2.356.367	3.968.894.493.111	(3.968.892.136.744)
DAK Nonfisik	200.959.099.252	165.968.874.317	34.990.224.935
Total	**200.961.455.619**	**4.134.863.367.428**	**(3.933.901.911.809)**

a. **Kewajiban TKD Satker DBH**

Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar (Transfer Dana Perimbangan YMHD) merupakan kewajiban jangka pendek yang muncul karena adanya Kurang Bayar DBH. Transfer Dana Perimbangan YMHD yang dicatat dalam Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Satker DBH meliputi seluruh hak Pemerintah Daerah atas Kurang Bayar transfer yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya.

Nilai Kewajiban Transfer Dana Perimbangan Yang Masih Harus Dibayar per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.356.367 atau mengalami penurunan sebesar Rp3.968.892.136.744.

Saldo akhir Kurang Bayar Dana Bagi Hasil per 31 Desember TA 2021 sebesar Rp0 atau nihil. Kemudian melalui PMK Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022, Pemerintah menetapkan Kurang Bayar DBH TA 2023 sebesar Rp42.940.634.673.256, yang terdiri dari penetapan kurang bayar tambahan SDA Kehutanan TA 2020 sebesar Rp25.107.446.837 dan penetapan kurang bayar DBH TA 2022 sebesar Rp42.915.527.226.419. Selanjutnya pada Bulan Desember 2023 Kementerian Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 yang menjadi dasar penyaluran Kurang Bayar DBH sampai dengan TA 2022 sebesar Rp46.909.526.810.000 yang terdiri dari penyelesaian kurang bayar DBH sampai dengan TA 2021 sebesar 3.994.001.349.000 dan penyelesaian kurang bayar DBH TA 2022 sebesar Rp42.915.525.461.000 sehingga sisa saldo Transfer Dana Perimbangan Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 adalah Rp2.356.367.

Rincian Kewajiban DBH disajikan pada tabel berikut ini:

No.	Transaksi	Jumlah
1.	Kewajiban DBH TA 2022 Audited	3.968.894.493.111
2.	Penetapan kewajiban tambahan DBH SDA Kehutanan TA 2020 berdasarkan PMK No. 90/PMK.07/2023	25.107.446.837
3.	Penetapan kewajiban DBH TA 2022 berdasarkan PMK No. 90/PMK.07/2023	42.915.527.226.419
4.	Penyelesaian kewajiban DBH sampai dengan TA 2021 berdasarkan KMK No. 38/KM.7/2023	(3.994.001.349.000)
5.	Penyelesaian kewajiban DBH TA 2022 berdasarkan KMK No. 38/KM.7/2023	(42.915.525.461.000)
Sisa Kewajiban		**2.356.367**

b. Kewajiban TKD Satker DAK Non Fisik

Nilai kewajiban Transfer DAK Nonfisik sebagaimana tersaji pada Neraca Satker Transfer DAK Nonfisik per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp200.959.099.252 dan Rp165.968.874.317 atau mengalami kenaikan sebesar Rp34.990.224.935 (21,08%). Nilai tersebut merupakan saldo Utang Transfer DAK Nonfisik yang terdiri dari kurang salur Dana TPG ASND, TKG

ASND, dan Tamsil Guru ASND tahun 2022 Audited serta terdapat pengakuan dan penyelesaian utang atas kurang salur DAK Non Fisik – TPG, TKG, dan Tamsil guru ASND.

Rincian mutasi utang utang DAK Non Fisik per 31 Desember 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

No.	Transaksi	Nilai (dalam rupiah)
1.	Utang atas Kurang Salur Dana Tunjangan Guru Tahun 2022 (TPG, TKG, Tamsil Guru ASND)	165.968.874.317
2.	Pengakuan utang atas kurang salur DAK Non Fisik TA 2023 untuk Dana Tamsil Guru ASND dan Dana TPG ASND	43.813.921.184
3.	Penyelesaian utang atas kurang salur Dana TKG ASND TA 2023	(8.823.696.249)
Total		**200.959.099.252**

Nilai kewajiban DAK Non Fisik per 31 Desember 2022 audited sebesar Rp165.968.874.317, terdiri dari kekurangan salur atas dana tunjangan guru tahun 2022 sesuai dengan LK BA 99905 audited TA 2022. Nilai tersebut telah diserahterimakan dari DJPK kepada DJPb berdasarkan BAST Utang piutang Satker 999820 DAK Non Fisik Nomor ND-367/PK.4/2023 tanggal 10 Juli 2023 untuk menindaklanjuti pengalihan penyaluran seluruh jenis TKD dari DJPK ke DJPb melalui 173 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Rincian saldo kewajiban DAK Non Fisik TA 2022 audited sebagaimana tersaji dalam tabel dibawah ini.

No.	Jenis Dana	Utang atas Kurang Salur Dana Tunjangan Guru Tahun 2023
1.	Dana TPG ASND	52.585.123.249
2.	Dana TKG ASND	37.952.927.237
3.	Dana Tamsil Guru ASND	75.430.823.831
Total		**165.968.874.317**

Pengakuan utang atas kurang salur DAK Non Fisik TA 2023 untuk Dana Tamsil Guru ASND dan Dana TPG ASND sebesar Rp43.813.921.184 merupakan angka kurang salur yang diketahui berdasarkan nota dinas Direktur DTK nomor ND-242/PK.3/2024 tanggal 6 Mei 2024 hal Penyampaian Data dan Informasi DAK non Fisik dalam rangka Penyusunan LK UAKKPA TA 2023 Audited. Rincian utang kurang salur Dana Tamsil Guru ASND dan Dana TPG ASND TA 2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

No.	Jenis Dana	Utang atas Kurang Salur Dana Tunjangan Guru Tahun 2023
1.	Dana TPG ASND	22.034.290.958
2.	Dana Tamsil Guru ASND	21.779.630.226
Total		**43.813.921.184**

Penyesuaian atas utang DAK Non Fisik sebesar minus Rp8.823.696.249 merupakan penyelesaian utang atas kurang salur Dana TKG ASND TA 2023 yang diketahui berdasarkan nota dinas Direktur DTK nomor ND-242/PK.3/2024 tanggal 6 Mei 2024 hal Penyampaian Data dan Informasi DAK non Fisik dalam rangka Penyusunan LK UAKKPA TA 2023 Audited. Rincian utang kurang salur dana Dana TKG ASND TA 2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

No.	Jenis Dana	Penyelesaian Utang atas Kurang Salur Dana Tunjangan Guru Tahun 2023
1.	Dana TKG ASND	(8.823.696.249)
Total		**(8.823.696.249)**

Rincian saldo kewajiban DAK Non Fisik TA 2023 audited sebagaimana tersaji dalam tabel dibawah ini.

No.	Jenis Dana	Utang atas Kurang Salur Dana Tunjangan Guru Tahun 2023
1.	Dana TPG ASND	74.619.414.207
2.	Dana TKG ASND	29.129.230.988
3.	Dana Tamsil Guru ASND	97.210.454.057
Total		**200.959.099.252**

Rincian Utang Transfer disajikan pada lampiran LD25e.

2. KEWAJIBAN TKD ESTIMASI

Kewajiban TKD Diestimasi - DBH per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp51.987.003.674.227 dan Rp45.707.179.744.949 atau mengalami kenaikan sebesar Rp6.279.823.929.278 (13,74%). Hal ini disebabkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan pada tahun 2023 meningkat sehingga potensi/estimasi Kurang Bayar pada Tahun Anggaran 2023 lebih tinggi. Saldo akhir Kewajiban TKD Diestimasi - DBH per 31 Desember 2023 secara ringkas dapat dilihat pada Tabel berikut:

No.	Jenis Dana	Saldo Kewajiban TKD Diestimasi - DBH
1.	DBH PPh Pasal 21	6.066.241.103.422
2.	DBH PPh Pasal 25/29 OP	621.359.075.331
3.	DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi	12.459.244.849.089
4.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	519.804.393.712
5.	DBH Minyak Bumi	46.584.555.124
6.	DBH Gas Bumi	1.374.124.044.298
7.	DBH Mineral dan Batubara - Landrent	182.934.669.790
8.	DBH Mineral dan Batubara - Royalti	29.838.338.471.550
9.	DBH Kehutanan - DR	41.587.680.680
10.	DBH Panas Bumi-Iuran Tetap	5.142.729.617
11.	DBH Panas Bumi-Setoran Bagian Pemerintah	831.642.101.614
Total		**51.987.003.674.227**

D.2.2.1.6. BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp638.823.906.087.471 dan Rp524.941.666.493.795 atau mengalami kenaikan sebesar Rp113.882.239.593.676 (21,69%) disebabkan karena meningkatnya *outstanding* utang. Saldo tersebut

merupakan reklasifikasi utang jangka panjang yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, *Unamortized Discount* sebesar minus Rp368.630.075.000 dan *Unamortized Premium* sebesar Rp440.320.180.000, sebagai berikut:

Akun	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		**638.823.906.087.471**	**524.941.666.493.795**	**113.882.239.593.676**	**21,69**
216111	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri	87.150.338.807.931	85.328.172.549.984	1.822.166.257.947	2,14
216112	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	4.682.550.610.035	3.534.774.838.832	1.147.775.771.203	32,47
216121	Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Rupiah	278.109.787.798.505	159.631.684.170.979	118.478.103.627.526	74,22
216131	Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Valuta Asing	63.289.655.871.000	82.383.552.934.000	(19.093.897.063.000)	(23,18)
216141	Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah	170.853.823.000.000	174.573.482.000.000	(3.719.659.000.000)	(2,13)
216151	Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing	34.737.750.000.000	19.490.000.000.000	15.247.750.000.000	78,23
Unamortized Discount		**(368.630.075.000)**	**(414.105.480.000)**	**45.475.405.000**	**(10,98)**
213122	*Discount* Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Rupiah	(103.827.563.000)	(383.383.489.000)	279.555.926.000	**(72,92)**
213124	*Discount* Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Valuta asing	(2.853.536.000)	(20.830.004.000)	17.976.468.000	**(86,30)**
213126	*Discount* Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah	(261.948.976.000)	(9.891.987.000)	(252.056.989.000)	**2.548,09**
Unamortized Premium		**440.320.180.000**	**795.587.678.000**	**(355.267.498.000)**	**(44,65)**
213131	*Premium* Bagian Lancar Obligasi Negara Rupiah.	175.242.064.000	45.332.293.000	129.909.771.000	**286,57**
213133	*Premium* Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah	265.078.116.000	750.255.385.000	(485.177.269.000)	**(64,67)**

Dari Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp638.823.906.087.471 terdapat porsi dari instrumen pinjaman sebesar Rp91.832.889.417.966 yang didalamnya termasuk penundaan pembayaran pokok kepada *Lender* Rusia, namun atas penundaan tersebut pihak Rusia tidak memperlakukan sebagai tunggakan.

Dari Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp638.823.906.087.471 terdapat Rp33.430.214 tunggakan, sebagaimana telah dijelaskan pada Catatan Penting Lainnya LRA A. BA BUN 999.01.

Rincian Bagian Lancar utang SBN dan Pinjaman termuat pada Lampiran LD26, LD27,LD27a, LD28 dan LD28a.

D.2.2.1.7. UTANG SURAT BERHARGA NEGARA – JANGKA PENDEK

Utang Surat Berharga Negara – Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp31.412.000.000.000 dan Rp49.028.000.000.000 atau mengalami penurunan sebesar Rp17.616.000.000.000 (35,93%) dengan *Unamortized Discount* sebesar minus Rp467.650.585.000.

Penurunan Utang SBN Jangka Pendek disebabkan karena volume transaksi lelang SPN/SPNS di tahun 2023 mengalami penurunan akibat minat investor atas SBN dengan tenor jangka pendek (SPN/SPNS) menurun dan *shifting* terhadap instrument lain yang memberikan *return* lebih baik atau instrumen dengan tenor yang lebih panjang sebagai dampak Kebijakan Bank Indonesia. Ketidakpastian global tahun 2023 yang meningkat diiringi dengan peningkatan volatilitas pasar keuangan yang cukup tinggi membuat Bank Indonesia mengambil kebijakan mempertahankan tingkat suku bunga pada level yang tinggi serta penerbitan instrumen SRBI dengan suku bunga jangka pendek sebagai tools pengendalian moneter.

Akun	Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Surat Berharga Negara – Jangka Pendek		**31.412.000.000.000**	**49.028.000.000.000**	**(17.616.000.000.000)**	**(35,93)**
217111	Surat Perbendaharaan Negara dalam Rupiah	27.792.000.000.000	47.255.000.000.000	(19.463.000.000.000)	(41,19)
217132	Surat Perbendaharaan Negara Syariah	3.620.000.000.000	1.773.000.000.000	1.847.000.000.000	104,17
Unamortized Discount		**(467.650.585.000)**	**(548.373.999.000)**	**80.723.414.000**	**(14,72)**
213121	*Discount* Surat Perbendaharaan Negara dalam Rupiah	(425.123.903.000)	(535.810.411.000)	110.686.508.000	(20,66)
213125	*Discount* Surat Perbendaharaan Negara Syariah dalam Rupiah	(42.526.682.000)	(12.563.588.000)	(29.963.094.000)	238,49

D.2.2.1.8. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp98.847.394.100 dan Rp23.352.703.695 atau mengalami sebesar Rp75.494.690.405 (323,28%).

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Umum Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP dengan rincian sebagai berikut:

No	UAKPA BUN TK	31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pengelola BMN yang berasal dari KKKS	59.666.370.529	7.024.529.080	52.641.841.449	749,40
2	Pengelola BMN Hulu Migas pada BPMA	19.455.290	139.737.722	(120.282.432)	(86,08)
3	Pengelola BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B	28.053.148.898	3.997.847.288	24.055.301.610	601,71
4	Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI	3.131.221.991	4.997.277.913	(1.866.055.922)	(37,34)
5	Pengelola BMN Eks Idle	33.500.000	-	33.500.000	-
6	Pengelola ABMA/T	3.621.561.100	2.706.210.783	915.350.317	33,82
7	Pengelola Aset Eks Pertamina	460.319.535	589.100.909	(128.781.374)	(21,86)
8	PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi	3.861.816.757	3.898.000.000	(36.183.243)	(0,93)
Total		**98.847.394.100**	**23.352.703.695**	**75.494.690.405**	**323,28**

1. Pendapatan Diterima Dimuka pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari KKKS per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp59.666.370.529 dan Rp7.164.266.802.

   Pendapatan Diterima Dimuka pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN Hulu Migas pada SKK Migas sebesar Rp59.666.370.529 sebagaimana tabel berikut:

Saldo 1 Januari 2023	**7.024.529.080**
Mutasi Tambah:	**59.666.370.529**
Pendapatan Sewa Diterima di Muka	59.666.370.529
Mutasi Kurang:	**7.024.529.080**
Penutupan Saldo	7.024.529.080
Saldo pendapatan diterima dimuka 31 Desember 2023	**59.666.370.529**

   a. Saldo awal sebesar Rp7.024.529.080 merupakan saldo Laporan Keuangan BMN Hulu Migas UAKPA BUN TK Tahun 2022 audited.

   b. Mutasi tambah sebesar Rp59.666.370.529 merupakan pemanfaatan BMN Hulu Migas pada 35 KKKS yang disebabkan:

      1) Adanya tambahan pendapatan diterima dimuka Rp56.885.105.177 yang berasal dari pembayaran sewa BMN pada tahun 2023 pada 16 KKKS sebesar Rp91.787.637.554, dimana terdapat beberapa sewa dengan jangka waktu sewa dimulai sebelum tahun 2023 sehinga terdapat koreksi pendapatan Rp7.862.104.202 dan pengakuan pendapatan tahun 2023 sebesar Rp27.040.428.175;

      2) Sisa saldo akrual pendapatan diterima dimuka pada tahun 2023 sebesar Rp2.781.265.352,19 pada 13 pemanfaatan.

   c. Mutasi kurang sebesar Rp7.024.529.080 disebabkan Penutupan Saldo Pendapatan Diterima Di Muka Tahun 2022.

2. Pendapatan Diterima Dimuka pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN Hulu Migas pada BPMA, Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp19.455.290 dan Rp139.737.722 sebagaimana tabel berikut:

Saldo Awal 1 Januari 2023	**139.737.722**
Mutasi Tambah:	**0**
Mutasi Kurang:	**120.282.432**
Penyesuaian Pendapatan Diterima di Muka	120.282.432
Saldo pendapatan diterima dimuka 31 Desember 2023	**19.455.290**

3. Pendapatan Diterima Dimuka pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp28.053.148.898 dan sebesar Rp3.997.847.288 yang berasal dari:

a. Saldo Awal Pendapatan diterima dimuka per 1 Januari 2023 sebesar Rp3.997.847.288 terdiri dari:

   1) Pendapatan sewa diterima dimuka BMN Pelabuhan ex-PKP2B PT BHP KCI sebesar Rp1.700.000.000 tahun 2018.

   2) Pemanfaatan BMN PKP2B PT Kaltim Prima Coal yang dimanfaatkan dalam bentuk sewa oleh PT Petromine Energy Trading dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan 2024 yaitu sebesar Rp2.282.847.288

   3) Uang muka sewa atas pemanfaatan BMN PKP2B pada PT Kaltim Prima Coal oleh PT PLN (Persero) sebesar Rp15.000.000 berupa tanah untuk tapak tower dan jalur span ROW yang tersebar di 8 (delapan) titik pada area lahan konsesi PKP2B PT KPC.

b. Terdapat Koreksi Tambah Pendapatan diterima dimuka atas kekurangan perhitungan hari kabisat atas pemanfaatan BMN berupa sebagian tanah seluas 551.900m2 PT Kaltim Prima Coal oleh PT Bayan Resources sebesar Rp3.782.610.

c. Terdapat Mutasi Tambah sebesar Rp34.535.230.000 yang merupakan pendapatan diterima dimuka atas pemanfaatan BMN berupa sebagian tanah seluas 551.900 m2 PT Kaltim Prima Coal oleh PT Bayan Resources dengan jangka waktu 10 tahun mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2031.

d. Terdapat Mutasi kurang sebesar Rp10.483.711.000 dengan rincian sebagai berikut:

   1) Pengakuan PNBP atas pemanfaatan BMN PKP2B PT KPC oleh PT Petromine sebesar Rp1.876.665.000;

   2) Pengakuan PNBP atas pemanfaatan BMN PKP2B PT KPC oleh PT Bayan sebesar Rp6.907.046.000;

   3) Koreksi Pendapatan diterima dimuka atas pemanfaatan kembali BMN yang telah diserahterima kepada Pemerintah oleh PT Kendilo Coal Indonesia sebesar Rp1.700.000.000 dikarenakan sejak terbitnya persetujuan pemafaatan sewa dari Kemenkeu belum ditindaklanjuti dengan persetujuan sewa dan sesuai surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara nomor S-1799/KN.4/2023 tanggal 17 Oktober 2023 Hal Tindak Lanjut Permohonan Pengembalian Dana Pembayaran Sewa BMN menyatakan bahwa atas angsuran uang muka yang telah dibayarkan oleh PT Kendilo Coal Indonesia sebesar Rp1.700.000.000 tidak dapat dikembalikan kepada PT Kendilo Coal Indonesia.

e. Saldo Akhir 31 Desember 2023 Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp28.053.148.898.

4. Diterima di Muka Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI, nilai pendapatan diterima di muka per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.131.221.991, sedangkan per 31 Desember Pendapatan 2022 adalah sebesar Rp4.997.277.913 yang berasal dari penurunan transaksi sewa atas aset properti eks BPPN dan transaksi sewa aset properti eks Kelolaan PT PPA.

   Rincian Pendapatan Diterima Di muka disajikan pada Lampiran LD29.

5. Pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN Eks Idle pada periode Tahun 2023, terdapat saldo utang jangka pendek berupa Pendapatan Diterima Dimuka dengan nilai total sebesar Rp33.500.000. Dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan sewa dibayar dimuka sebesar Rp17.000.000 atas pemanfaatan BMN eks BMN Idle sesuai dengan KMK 146/KM.6/2021 tentang Pelaksanaan Sewa BMN Eks BMN Idle dengan Sdr. Renan Amru Kafi;

b. Pendapatan sewa dibayar dimuka sebesar Rp16.500.000 atas pemanfaatan BMN eks BMN Idle sesuai dengan KMK 166/KM.6/2023 tentang Pelaksanaan Sewa BMN Eks BMN Idle pada KPKNL Metro.

6. Pada UAKPA BUN TK Pengelola ABMA/T, nilai Kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Nilai Kewajiban Tahun 2023 adalah senilai Rp3.621.561.100 (tiga miliar enam ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah) yaitu kewajiban jangka pendek yang merupakan pendapatan diterima di muka yang berasal dari pembayaran pihak ketiga untuk kompensasi ABMA/T namun belum dapat diterbitkan KMK pelepasan ABMA/T sampai dengan Tahun 2023, yang berasal dari nilai saldo akhir kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.706.210.783, dengan rincian sebagai berikut:

   a. ABMA/T Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Veteran Palopo sebesar Rp100.000.000;

   b. ABMA/T Rumah Sakit Bersalin Sentosa di Provinsi Sulawesi Selatan secara bertahap sebanyak 99 kali selama 11 tahun sejak tahun 2002 s.d. 2011 sebesar Rp2.186.911.000;

   c. ABMA/T Yayasan Pendidikan Teknologi (YPT) Pangkalan Susu (d.h ST dan STM) di Provinsi Sumatera Utara untuk Pembayaran Berkala Pertama sebesar Rp23.528.890;

   d. ABMA/T Yayasan Pendidikan Teknologi (YPT) Pangkalan Susu (d.h ST dan STM) di Provinsi Sumatera Utara untuk Pembayaran Berkala Kedua sebesar Rp23.528.890;

   e. ABMA/T Yayasan Pendidikan Teknologi (YPT) Pangkalan Susu (d.h ST dan STM) di Provinsi Sumatera Utara untuk Pembayaran Berkala Ketiga sebesar Rp23.528.890;

   f. ABMA/T Sekolah Tinggi Sospol Veteran RI di Provinsi Sulawesi Selatan untuk Pembayaran Berkala Pertama sebesar Rp95.696.113;

   g. ABMA/T Rumah Tinggal atas nama Budiyanto (d.h Rumah Tinggal Penampungan) di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp16.920.000;

   h. ABMA/T Rumah Tinggal atas nama Jimmy Hartono (d.h Rumah Tinggal Penampungan) di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp22.842.000;

   i. ABMA/T Rumah Tinggal atas nama Liong Mung Kian (d.h Rumah Tinggal Penampungan) di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp18.733.000;

   j. ABMA/T Rumah Tinggal atas nama Lie Jun (d.h Rumah Tinggal Penampungan) di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp35.569.000;

   k. ABMA/T Rumah Tinggal atas nama Lie Bun Fan (d.h Rumah Tinggal Penampungan) di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp24.171.000;

   l. ABMA/T Rumah Tinggal atas nama Wie Lim (d.h Rumah Tinggal Penampungan) di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp37.131.000;

   m. ABMA/T Rumah Tinggal atas nama Nyuk Min (d.h Rumah Tinggal Penampungan) di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp37.344.000;

n. ABMA/T Rumah Tinggal atas nama Fie Sian (d.h Rumah Tinggal Penampungan) di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp22.237.000;

o. ABMA/T Rumah Tinggal atas nama Cham A Moi (d.h Rumah Tinggal Penampungan) di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp19.337.000;

p. ABMA/T Rumah Tinggal atas nama Lie Ki Sang (d.h Rumah Tinggal Penampungan) di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp18.733.000.

Ditambah dengan kewajiban yang berasal dari nilai pembayaran/pelunasan kompensasi ABMA/T yang dilakukan sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp3.057.175.007 (tiga miliar lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. ABMA/T Yayasan Pendidikan Teknologi (YPT) Pangkalan Susu (d.h ST dan STM) di Provinsi Sumatera Utara untuk Pembayaran Berkala Keempat sebesar Rp23.528.890;

b. ABMA/T Rumah Tinggal a.n Arim (d.h Kantor Kepala Desa/Kebun PKK) di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp57.463.000;

c. ABMA/T Sekolah Tinggi Sospol Veteran RI di Provinsi Sulawesi Selatan untuk Pembayaran Berkala Kedua, Ketiga, dan Keempat sebesar Rp287.088.339;

d. ABMA/T Sekolah Tinggi Sospol Veteran RI di Provinsi Sulawesi Selatan untuk Pembayaran Berkala Kelima sebesar Rp95.696.113;

e. ABMA/T Yayasan Pendidikan Swadaya Pangkalpinang (d.h SD/SMP/SMA Swadaya Pangkalpinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp1.074.074.750;

f. ABMA/T Sekolah Tinggi Sospol Veteran RI di Provinsi Sulawesi Selatan untuk Pembayaran Berkala Keenam sebesar Rp95.696.113;

g. ABMA/T Sekolah Tinggi Sospol Veteran RI di Provinsi Sulawesi Selatan untuk Pembayaran Berkala Ketujuh sebesar Rp95.696.113;

h. ABMA/T Yayasan Pendidikan Bakti Jebus (d.h SD/SMP Bhakti) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp409.176.600;

i. ABMA/T Yayasan Pendidikan Teknologi (YPT) Pangkalan Susu (d.h ST dan STM) di Provinsi Sumatera Utara untuk Pembayaran Berkala Kelima sebesar Rp23.528.890;

j. ABMA/T Sekolah Tinggi Sospol Veteran RI di Provinsi Sulawesi Selatan untuk Pembayaran Berkala Kedelapan sebesar Rp95.696.113;

k. ABMA/T Rumah Tinggal Suriansyah (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan Pembayaran Berkala Pertama sebesar Rp5.520.763;

l. ABMA/T Sekolah Tinggi Sospol Veteran RI di Provinsi Sulawesi Selatan untuk Pembayaran Berkala Kesembilan sebesar Rp95.696.113;

m. ABMA/T Rumah Tinggal Suriansyah (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan untuk Pembayaran Berkala Kedua sebesar Rp5.520.763;

n. ABMA/T Rumah Tinggal Hartani Bakti (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp98.135.000;

o. ABMA/T Rumah Tinggal H.M. Syakhril (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp108.785.000;

p. ABMA/T Rumah Tinggal S. Prawirawidjaja / Subianto (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan untuk Pembayaran Berkala Pertama sebesar Rp5.195.529;

q. ABMA/T Rumah Tinggal SJ Asthary PK (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan untuk Pembayaran Berkala Pertama sebesar Rp5.195.529;

r. ABMA/T Sekolah Tinggi Sospol Veteran RI di Provinsi Sulawesi Selatan untuk Pembayaran Berkala Kesepuluh sebesar Rp95.696.113;

s. ABMA/T Rumah Tinggal Suriansyah (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan untuk Pembayaran Berkala Ketiga sebesar Rp5.520.763;

t. ABMA/T Rumah Tinggal S. Prawirawidjaja / Subianto (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan untuk Pembayaran Berkala Kedua sebesar Rp5.195.592;

u. ABMA/T Rumah Tinggal SJ Asthary PK (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan untuk Pembayaran Berkala Kedua sebesar Rp5.195.529;

v. ABMA/T Yayasan Pendidikan Teknologi (YPT) Pangkalan Susu (d.h ST dan STM) di Provinsi Sumatera Utara untuk Pembayaran Berkala Keenam sebesar Rp23.528.890;

w. ABMA/T Rumah Tinggal Suriansyah (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan untuk Pembayaran Berkala Keempat sebesar Rp5.520.763;

x. ABMA/T Rumah Tinggal S. Prawirawidjaja / Subianto (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan untuk Pembayaran Berkala Ketiga sebesar Rp5.195.592;

y. ABMA/T Rumah Tinggal SJ Asthary PK (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan untuk Pembayaran Berkala Ketiga sebesar Rp5.195.529;

z. ABMA/T Sekolah Tinggi Sospol Veteran RI di Provinsi Sulawesi Selatan untuk Pembayaran Berkala Kesebelas dan Keduabelas sebesar Rp191.392.226;

aa. ABMA/T Rumah Tinggal Suriansyah (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan untuk Pembayaran Berkala Kelima sebesar Rp5.520.763;

bb. ABMA/T Rumah Tinggal S. Prawirawidjaja / Subianto (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan untuk Pembayaran Berkala Keempat sebesar Rp5.195.403;

cc. ABMA/T Rumah Tinggal SJ Asthary PK (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan untuk Pembayaran Berkala Keempat sebesar Rp5.195.529;

dd. ABMA/T Rumah Tinggal Suriansyah (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan untuk Pembayaran Berkala Keenam sebesar Rp5.520.763;

ee. ABMA/T Rumah Tinggal S. Prawirawidjaja / Subianto (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan untuk Pembayaran Berkala Kelima sebesar Rp5.195.529;

ff. ABMA/T Rumah Tinggal SJ Asthary PK (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan untuk Pembayaran Berkala Kelima sebesar Rp5.195.529;

gg. ABMA/T Sekolah Tinggi Sospol Veteran RI di Provinsi Sulawesi Selatan untuk Pembayaran Berkala Ketigabelas sebesar Rp95.696.113;

hh. ABMA/T Rumah Tinggal Suriansyah (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan untuk Pembayaran Berkala Ketujuh sebesar Rp5.520.763.

Nilai tersebut selanjutnya dikurangi dengan nilai kompensasi atas ABMA/T yang diselesaikan/diterbitkan KMK pelepasan sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp2.141.824.690 dengan rincian sebagai berikut:

a. ABMA/T Rumah Tinggal atas nama Budiyanto (d.h Rumah Tinggal Penampungan) di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp16.920.000;
b. ABMA/T Rumah Tinggal atas nama Jimmy Hartono (d.h Rumah Tinggal Penampungan) di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp22.842.000;
c. ABMA/T Rumah Tinggal atas nama Liong Mung Kian (d.h Rumah Tinggal Penampungan) di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp18.733.000;
d. ABMA/T Rumah Tinggal atas nama Lie Jun (d.h Rumah Tinggal Penampungan) di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp35.569.000;
e. ABMA/T Rumah Tinggal atas nama Lie Bun Fan (d.h Rumah Tinggal Penampungan) di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp24.171.000;
f. ABMA/T Rumah Tinggal atas nama Wie Lim (d.h Rumah Tinggal Penampungan) di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp37.131.000;
g. ABMA/T Rumah Tinggal atas nama Nyuk Min (d.h Rumah Tinggal Penampungan) di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp37.344.000;
h. ABMA/T Rumah Tinggal atas nama Fie Sian (d.h Rumah Tinggal Penampungan) di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp22.237.000;
i. ABMA/T Rumah Tinggal atas nama Cham A Moi (d.h Rumah Tinggal Penampungan) di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp19.337.000;
j. ABMA/T Rumah Tinggal atas nama Lie Ki Sang (d.h Rumah Tinggal Penampungan) di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp18.733.000;
k. ABMA/T Rumah Tinggal a.n Arim (d.h Kantor Kepala Desa/Kebun PKK) di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp57.463.000;
l. ABMA/T Yayasan Pendidikan Swadaya Pangkalpinang (d.h SD/SMP/SMA Swadaya Pangkalpinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp1.074.074.750;
m. ABMA/T Yayasan Pendidikan Bakti Jebus (d.h SD/SMP Bhakti) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp409.176.600;
n. ABMA/T Rumah Tinggal Hartani Bakti (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp98.135.000;
o. ABMA/T Rumah Tinggal H.M. Syakhril (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp108.785.000;
p. ABMA/T Yayasan Pendidikan Teknologi (YPT) Pangkalan Susu (d.h ST dan STM) di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp141.173.340.

Dengan demikian membentuk nilai kewajiban sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp3.621.561.100.

7. Kewajiban dalam Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina, Kewajiban berupa kewajiban jangka pendek, yang mana harus diselesaikan dalam 1 (satu) periode pelaporan, dan kewajiban jangka panjang, yang diselesaikan lebih dari 1 (satu) periode pelaporan.

   Kewajiban jangka pendek sebesar Rp460.319.535 merupakan pendapatan diterima dimuka yang akan berubah menjadi pendapatan pada tahun berjalan, dalam hal ini 2023. Komponennya adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Pendapatan Diterima di Muka 1 Januari 2023 di Neraca	**589.100.909**
Pendapatan Diterima di muka atas aset yang telah laku lelang (sesuai KMK 11/KM.6/KN.4/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dan Risalah Lelang Nomor 116/15/2023 tanggal 12 Juni 2023) namun belum dilakukan BAST dengan pembeli	202.220.000
Pendapatan Diterima di muka yang diakui sebagai sebagai pendapatan atas Aset yang telah dilelang sesuai Risalah Lelang Nomor 335/35/2022 tanggal 08 Juli 2022 dan dihapuskan sesuai KMK 6/KM.6/KN.3/2022 KMK 11/MK.6/KN.4/2023, BAST baru diterima pada Semester 1 2023	(323.000.000)
Koreksi atas Reklasifikasi Kewajiban Jangka Panjang menjadi Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Bass Oil seharusnya 43 bulan	1.148.626
Pendapatan diterima di muka dari sewa Bank Mandiri Palembang bulan Januari s.d. Desember 2023 yang diakui sebagai pendapatan.	(9.150.000)
Pendapatan diterima di muka dari sewa Bank Mandiri Palembang untuk KCP Prabumulih bulan Januari s.d. Desember 2023 yang diakui sebagai pendapatan.	(69.060.000)
Pendapatan diterima di muka dari sewa Bank Mandiri Sudirman untuk aset yang berada di Jalan Cemara bulan Januari s.d. Desember 2023 yang diakui sebagai pendapatan.	(136.600.000)
Pendapatan diterima di muka dari sewa penyediaan infrastruktur PT PLN untuk aset yang berada di Cirebon bulan Januari s.d. Desember 2023 yang diakui sebagai pendapatan.	(1.900.000)
Pendapatan diterima di muka dari sewa Bass Oil Sukananti Limited bulan Januari s.d. Desember 2023 yang diakui sebagai pendapatan.	(50.539.535)
Pendapatan diterima di muka atas Perpanjangan Sewa PT Elnusa di Jalan Pramuka, Prabumulih	7.608.250
Pendapatan diterima di muka atas Perpanjangan Sewa PT Elnusa di Jalan Pramuka, Prabumulih yang diakui sebagai pendapatan.	(7.608.250)
Reklasifikasi Kewajiban Jangka Panjang menjadi Kewajiban Jangka Pendek Sewa KCP Prabumulih	69.060.000
Reklasifikasi Kewajiban Jangka Panjang menjadi Kewajiban Jangka Pendek Sewa Bank Mandiri Palembang Sudirman	136.600.000
Reklasifikasi Kewajiban Jangka Panjang menjadi Kewajiban Jangka Pendek Sewa PT PLN 50	1.900.000
Reklasifikasi Kewajiban Jangka Panjang menjadi Kewajiban Jangka Pendek Sewa Bass Oil	50.539.535
Pendapatan Diterima di Muka s.d 31 Desember 2023 di Neraca	**460.319.535**

8. Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp3.861.816.757 dan Rp3.898.000.000. Saldo tahun 2022 merupakan PNBP Migas Lainnya atas adanya tagihan bonus produksi pada KKKS PHE Tomori yang diterbitkan dan dibayarkan pada tahun 2017 sebesar US$2.500.000, kemudian terdapat koreksi tagihan oleh SKK Migas pada tahun 2021 menjadi sebesar US$2.250.000. Sedangkan saldo tahun 2023 terdapat kelebihan pembayaran atas jasa pemanduan dan penundaan oleh PT Peteka Karya Samudera.

D.2.2.1.9. PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN

Saldo Pendapatan Ditangguhkan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp403.617.716.901 dan Rp4.056.160.026 atau mengalami kenaikan sebesar Rp399.561.556.875 (9850,73%). Saldo tersebut merupakan saldo penerimaan yang masih tersedia di Rekening Migas per tanggal pelaporan, yang masih belum jelas peruntukannya dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Ditangguhkan	403.617.716.901	4.056.160.026	399.561.556.875	9850,73

D.2.2.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

D.2.2.2.1. UTANG JANGKA PANJANG SURAT BERHARGA NEGARA

Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp6.563.241.522.670.168 dan Rp6.361.787.234.099.673 atau mengalami kenaikan sebesar Rp201.454.288.570.495 (3,17%) dengan *Unamortized Discount* sebesar minus Rp49.942.041.191.000 dan *Unamortized Premium* sebesar Rp44.567.904.657.000. Terdapat kenaikan Utang Jangka Panjang SBN dikarenakan penerbitan SBN Tahun 2023 yang lebih besar dari pelunasannya.

Rincian Utang Utang Jangka Panjang SBN per 31 Desember 2023 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Akun	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri		**6.563.241.522.670.168**	**6.361.787.234.099.673**	**201.454.288.570.495**	**3,17**
221211	Utang Dalam Negeri Obligasi Negara Dalam Rupiah	4.368.764.667.833.168	4.234.235.051.631.673	134.529.616.201.495	3,18
221221	Utang Dalam Negeri Obligasi Negara Dalam Valuta Asing	970.791.364.837.000	981.985.834.468.000	(11.194.469.631.000)	(1,14)
221231	Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang dalam Rupiah	919.923.165.000.000	834.895.748.000.000	85.027.417.000.000	10,18
221241	Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang dalam Valuta Asing	303.762.325.000.000	310.670.600.000.000	(6.908.275.000.000)	(2,22)
Unamortized Discount		**(49.942.041.191.000)**	**(52.953.994.105.000)**	**3.011.952.914.000**	**(5,69)**
221251	*Discount Obligasi Negara - dalam rupiah*	(29.494.544.271.000)	(32.818.760.067.000)	3.324.215.796.000	(10,13)
221252	*Discount Obligasi Negara - dalam valuta asing*	(4.765.122.691.000)	(4.400.865.622.000)	(364.257.069.000)	(8,28)
221253	*Discount SBSN - dalam rupiah*	(15.682.374.229.000)	(15.734.368.416.000)	51.994.187.000	(0,33)
Unamortized Premium		**44.567.904.657.000**	**43.768.938.860.000**	**798.965.797.000**	**1,83**
221261	*Premium Obligasi Negara - dalam rupiah*	34.466.036.431.000	32.666.834.421.000	1.799.202.010.000	5,51
221262	*Premium Obligasi Negara - dalam valuta asing*	566.951.405.000	611.233.837.000	(44.282.432.000)	(7,24)
221263	*Premium SBSN - dalam rupiah*	9.534.916.821.000	10.490.870.602.000	(955.953.781.000)	(9,11)

Rincian Profil Jatuh tempo Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri dapat dilihat pada Lampiran LD30,

D.2.2.2.2. UTANG KEPADA DANA PENSIUN DAN THT

Saldo Utang Kepada Dana Pensiun dan THT 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp25.871.215.355.337 dan Rp24.446.771.532.148 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.424.443.823.189 (5,83%).

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	25.871.215.355.337	24.446.771.532.148	1.424.443.823.189	5,83

Pada Tahun 2022 telah ditetapkan Kewajiban Kekurangan Pendanaan Program THT PT Taspen (Persero) melalui Surat Menteri Keuangan nomor S-75/MK.02/2023 hal Penetapan dan Pengakuan Kewajiban atas Kekurangan Pendanaan Program Tabungan Hari Tua pada PT Taspen (Persero) sebesar Rp22.176.507.759.421 dan pada Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Surat Menteri Keuangan nomor S-263/MK.02/2024 Hal Pengakuan dan Penetapan *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) Program THT yang Dikelola PT Taspen (Persero) Tahun 2023 sebesar Rp3.694.707.595.916, maka total UPSL PT Taspen (Persero) di Tahun 2023 sebesar Rp25.871.215.355.337.

Selain itu telah ditetapkan UPSL PT Asabri (Persero) Tahun 2022 melalui surat Menteri Keuangan nomor S-56/MK.02/2023 hal Penetapan *Unfunded Past Service Liability* Program Tabungan Hari Tua pada PT Asabri (Persero) sebesar Rp4.550.263.772.727 yang telah dibayarkan di tahun 2022 sebesar Rp2.280.000.000.000 dan di tahun 2023 sebesar Rp2.270.263.772.727, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo per 31 Des 2022	Mutasi tahun 2023	Saldo per 31 Des 2023
	Utang kepada Dana Pensiun dan THT			
1	Pengakuan Utang Jangka Panjang (UPSL) Asabri Tahun 2022	2.270.263.772.727	2.270.263.772.727	-
2	Pengakuan Utang Jangka Panjang (UPSL) Taspen Tahun 2022	22.176.507.759.421		22.176.507.759.421
3	Pengakuan Utang Jangka Panjang (UPSL) Taspen Tahun 2023			3.694.707.595.916
Jumlah		**24.446.771.532.148**		**25.871.215.355.337**

D.2.2.2.3. PEMBIAYAAN SURAT BERHARGA NEGARA DITANGGUHKAN

Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp39.891.869.021.700 merupakan total dari nilai *cash proceeds* penerbitan SBN Rupiah yang diterbitkan dalam rangka *prefunding* pembiayaan Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan besarnya kebutuhan pembiayaan utang tahun 2024 dan ketidakpastian global yang menyebabkan volatilitas pasar keuangan yang diperkirakan masih tinggi pada tahun 2024.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan	39.891.869.021.700	-	39.891.869.021.700	100

Daftar Seri SBN yang diterbitkan sebagai pembiayaan SBN ditangguhkan dapat dilihat pada Lampiran LD30f

D.2.2.2.4. UTANG JANGKA PANJANG SUBSIDI

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp560.625.887.734 dan Rp27.102.028.797.720 atau mengalami penurunan sebesar Rp26.541.402.909.986 (97,93%). Penurunan ini disebabkan reklasifikasi Utang Jangka Panjang pada karena kebijakan akuntansi untuk pengakuan awal utang sebagai kewajiban jangka pendek.

Rincian Utang Jangka Panjang Subsidi per Kementerian Negara/Lembaga adalah sebagai berikut:

No	K/L	Jumlah		Kenaikan/	%
		31 Desember 2023	31 Desember 2022	(Penurunan)	
1	Keuangan	-	10.202.763.161.231	(10.202.763.161.231)	(100)
2	Pertanian	420.266.452.275	16.788.763.757.968	(16.368.497.305.693)	(97,50)
3	Perhubungan	140.359.435.459	110.501.878.521	29.857.556.938	27,02
	Jumlah	**560.625.887.734**	**27.102.028.797.720**	**(26.541.402.909.986)**	**(97,93)**

1. Kementerian Keuangan

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2023 sebesar Rp0. Jumlah ini menurun sebesar Rp1.746.544.353.114 dibanding posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.202.763.161.231.

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.746.544.353.114 yang berasal dari Ditjen Pajak yang meliputi Utang Subsidi Jangka Panjang tahun 2023 atas tagihan Subsidi PPh DTP tahun 2023 yang telah dilakukan verifikasi namun belum dilakukan pembayaran karena pagu anggaran tahun 2023 yang tidak mencukupi.

Utang subsidi jangka panjang atas tagihan Subsidi PPh DTP Panas Bumi tahun 2023 sebesar Rp917.820.311.039 dan PPh DTP SBN Valas tahun 2023 sebesar Rp323.169.474.517. Selain itu, terdapat pula Utang Subsidi Jangka Panjang tahun 2023 yang berasal dari tagihan Subsidi PPN DTP atas penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan/atau KBL Bus Tertentu kepada pembeli (PPN DTP KBLBB) tahun 2023 yang telah terverifikasi namun belum dibayarkan sebesar Rp505.554.567.558.

Jumlah keseluruhan di atas direklasifikasi menjadi kewajiban jangka pendek, dalam akun utang subsidi, karena mengikuti kebijakan akuntansi bahwa pengakuan utang pemerintah adalah berjangka pendek, kecuali terdapat dokumen atau pernyataan bahwa utang dimaksud belum akan diselesaikan dalam rentang satu tahun ke depan.

2. Kementerian Pertanian

Utang subsidi jangka panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah senilai Rp420.266.452.275 dan Rp16.788.763.757.968. Utang Jangka Panjang Subsidi merupakan Sisa

Kurang Bayar TA. 2020 Audited yang dikoreksi oleh Itjen Kementan senilai Rp419.393.598 menjadi Rp420.266.452.275. Berikut dapat disajikan pada tabel di bawah ini.

Uraian Jenis Belanja	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / (penurunan	
			(Rp)	%
Utang Subsidi Jangka Panjang	420.266.452.275	16.788.763.757.968	(16.368.497.305.693)	(97,50)
	420.266.452.275	**16.788.763.757.968**	**(16.368.497.305.693)**	**(97,50)**

Total kurang bayar tahun 2020 senilai Rp2.500.466.516.828 menggunakan perhitungan kurang bayar Tahun 2020 pembulatan desimal ke bawah sehingga terdapat selisih Rp3 dengan yang tercatat di neraca senilai Rp2.500.466.516.831.

Sedangkan yang sudah terbayarkan di tahun 2021 senilai Rp2.070.231.577.000 dan terkoreksi dari hasil reviu Itjen Kementan No. R-662/PW.220/G/12/2021 senilai Rp419.393.598 dan No R.470/PW.110/G.3/12/2022 senilai Rp9.601.284.671 sehingga masih ada sisa kurang bayar tahun 2020 senilai Rp420.266.452.275.

3. Kementerian Perhubungan

Utang Jangka Panjang Subsidi merupakan Kewajiban pemerintah yang belum di anggarkan pembayarannya. Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp140.359.435.459 dan Rp110.501.878.521.

Rincian Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2023 sebesar Rp140.359.435.459 hanya berada di Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp140.359.435.459 terdiri dari kurang bayar PSO TA 2015 sebesar Rp2.216.878.521 dan TA 2016 sebesar Rp108.285.000.000 serta sisa tunggakan PSO hasil audit BPK RI TA. 2022 sebesar 29.857.556.938.

Rincian nilai utang jangka panjang sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Utang subsidi PSO TA 2015	2.216.878.521
2	Utang subsidi PSO TA 2016	108.285.000.000
3	Sisa tunggakan PSO hasil audit BPK TA 2022	29.857.556.938
Total		**140.359.435.459**

D.2.2.2.5. UTANG JANGKA PANJANG PINJAMAN DALAM NEGERI

Jumlah Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp31.552.061.212.395 dan Rp18.141.468.578.073 atau mengalami kenaikan sebesar Rp13.410.592.634.322 (73,92%).

No	Nama	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Jangka Panjang DN		31.552.061.212.395	18.141.468.578.073	13.410.592.634.322	73,92
221771	Utang Jangka Panjang Pinjaman DN	31.552.061.212.395	18.141.468.578.073	13.410.592.634.322	73,92

Utang Jangka Panjang – Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2023 sebesar Rp31.552.061.212.395 mengalami kenaikan sebesar Rp13.410.592.634.322 atau 73.92% dibandingkan Tahun 2022. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya peningkatan penarikan Pinjaman Dalam Negeri yang digunakan antara lain untuk membiayai kegiatan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) TNI dan kegiatan pengadaan Alat Material Khusus (almatsus) Polri serta beberapa kegiatan pada BIN.

D.2.2.2.6. UTANG JANGKA PANJANG DALAM NEGERI LAINNYA

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp312.277.312.036.535 dan Rp279.218.156.681.472 atau mengalami kenaikan sebesar Rp33.059.155.355.063 (11,84%).

Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	BA 999.03	1.750.007.897	-	1.750.007.897	100
2	BA 999.04	1.911.927.727.159	1.911.927.727.159	-	-
3	BA 999.08	51.000.911.330.754	47.328.694.372.544	3.672.216.958.210	7,76
4	BA 999.99	259.362.722.970.725	229.977.534.581.769	29.385.188.388.956	12,78
Jumlah		**312.277.312.036.535**	**279.218.156.681.472**	33.059.155.355.063	11,84

a. BA 999.03

Nilai utang jangka panjang dalam negeri lainnya berasal dari UAKPA BLU LPDB KUMKM sebesar Rp1.750.007.897. Nilai tersebut merupakan pencairan klaim subrogasi mitra pada tahun 2022 sebesar Rp860.633.286 dan pencairan klaim subrogasi mitra tahun 2023 sebesar Rp889.374.611 yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas.

Pencatatan tersebut sesuai dengan Petunjuk Teknis Akuntansi 05 tentang Akuntansi pada Satker BLU Pengelola Dana Bergulir, bahwa atas penerimaan klaim penjaminan utang pokok dan bergulir oleh satker BLU Pengelola Dana, Satker BUN Investasi Pemerintah pada BLU (BA BUN 999.03) menyajikan saldo kewajiban subrogasi dengan melakukan perekaman jurnal penyesuaian secara manual pada SPAN.

b. BA 999.04

Tidak terdapat perubahan nilai Kewajiban Jangka Panjang posisi 31 Desember 2023 dengan posisi 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp1.911.927.727.159. Kewajiban Jangka Panjang tersebut merupakan Kewajiban atas risk sharing Kredit Program KUT TP 1998/1999. Kredit Usaha Tani (KUT) adalah salah satu skim Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) berupa pemberian kredit modal kerja yang diberikan BI kepada bank pelaksana untuk disalurkan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani melalui koperasi primer/LSM guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija dan holtikultura. Terdapat dua pola dalam penyaluran KUT yaitu pola executing dan pola channeling. Penyaluran KUT TP 1998/1999 dilakukan dengan pola channeling yakni bank pelaksana terbatas hanya sebagai penyalur (agen channeling) ke Koperasi/LSM. Sedangkan koperasi/LSM bertindak sebagai executing yang bertanggung jawab atas penyaluran dan

pelunasan KUT kepada dan dari kelompok tani. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-628/MK.017/1998 tanggal 7 Desember 1998, pembagian risk sharing atas tunggakan KUT tersebut yaitu sebesar 52,25% ditanggung Pemerintah. sebesar 42,75% ditanggung Bank Indonesia dan sebesar 5% ditanggung Perum Jamkrindo.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 091/LHP/XV/12/2010 tanggal 31 Desember 2010 diketahui bahwa realisasi penyaluran KUT TP 1998/1999 adalah sebesar Rp7.677.429.744.359,79. terdapat pelunasan (BI mendebet rekening giro bank pelaksana di BI) sebesar Rp1.968.960.319.699,61 sehingga masih terdapat tunggakan sebesar Rp5.708.469.424.660,18. Dari tunggakan tersebut terdapat nilai yang belum disepakati berupa penyaluran tidak didukung dokumen lengkap sebesar Rp1.539.052.034.110,09 dan tunggakan yang tidak didukung Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebesar Rp510.225.568.235,53. Dengan demikian estimasi tunggakan yang dapat diperhitungkan untuk risk sharing adalah sebesar Rp3.659.191.822.314,56. Risk sharing yang ditanggung Pemerintah adalah sebesar 52,25% sehingga Pemerintah mengakui adanya Kewajiban atas Risk Sharing Kredit Program KUT TP 1998/1999 sebesar Rp1.911.927.727.159,36 (52,25% x Rp3.659.191.822.314,56).

Pemerintah dapat menyesuaikan nilai Kewajiban atas risk sharing Kredit Program KUT berdasarkan hasil verifikasi lapangan, putusan pengadilan atau hal lain yang menyebabkan Pemerintah dapat menyesuaikannya. Di samping itu, dalam rangka penyelesaian kewajiban risk sharing program KUT dan sesuai dengan hasil rapat konsultasi Pemerintah dengan DPR pada tahun 2004. besaran kewajiban risk sharing KUT tersebut perlu mendapat persetujuan DPR.

Terdapat temuan BPK atas laporan keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2011 yaitu penyelesaian kesepakatan antara Pemerintah, BI dan Perum Jamkrindo atas Risk Sharing Tunggakan KUT TP 1998/1999 Pola Channeling sebesar Rp5,71Triliun berlarut-larut. Pada tahun 2018 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan hal Tindak Lanjut Penyelesaian Tunggakan KUT TP 1998/99. Dalam surat tersebut, Kemenko meminta pendapat BPK terkait rekomendasi BPK untuk mengajukan penyelesaian tersebut ke DPR dan harus dapat memisahkan penerima KUT petani dan bukan petani karena saat ini hal tersebut tidak mungkin dilakukan.

c. BA 999.08

Saldo Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp51.000.911.330.754 dan Rp47.328.694.372.544.

Saldo utang tersebut berasal dari satker SKK Migas yang merupakan kontra-akun dana kegiatan pasca-operasi dan Pemulihan Lingkungan atau Abandonment and Site Restoration (ASR) dalam kegiatan usaha hulu migas yang disajikan sebagai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya. Pencatatan tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2020 Nomor : 25b/LHP/XV/05/2021 tanggal 29 Mei 2021, yaitu pengaturan yang lebih detail atas kebijakan akuntansi dan mekanisme pelaporan atas pencadangan Dana ASR, termasuk Dana ASR yang dikelola oleh BPMA.

d. BA 999.99

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp259.362.722.970.725 dan Rp229.977.534.581.769 terdiri dari Akumulasi Iuran Pensiun yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) dan Akumulasi Iuran Pensiun yang dikelola oleh PT Asabri (Persero) serta aset eks Pertamina.

Perbandingan nilai Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
Utang Jangka Panjang Lainnya			
AIP yang dikelola PT Taspen (Persero)	231.572.672.909.516	205.285.435.523.564	26.287.237.385.952
AIP yang dikelola PT Asabri (Persero)	27.789.462.568.147	24.691.252.316.982	3.098.210.251.165
Aset Eks Pertamina	587.493.062	846.741.223	(259.248.161)
Total Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	**259.362.722.970.725**	**229.977.534.581.769**	**29.385.188.388.956**

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya terdiri dari :

a. Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). AIP ini dicatat selain dicatat sebagai Aset Lainnya. juga dicatat sebagai utang karena merupakan dana milik peserta yang kolektif dikuasai oleh pemerintah.
   Berdasarkan PMK Nomor 175 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus pencatatan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya merupakan penjurnalan dari Aset Lainnya sebagai akun lawannya.
   Nilai AIP di atas dicatat berdasarkan dokumen sumber dari Laporan Keuangan AIP antara Kuasa Pengguna Anggaran denganTahun 2023 Audited PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) dengan penjelasan sebagaimana dijelaskan pada D.2.1.6.2.5 Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.99 yaitu:
   1) Berdasarkan Laporan Keuangan AIP TA. 2023 Audited PT. Taspen (Persero) tanggal 25 Maret 2024 disebutkan bahwa saldo AIP PT. Taspen (Persero) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp231.572.672.909.516.
   2) Berdasarkan Laporan Keuangan AIP TA. 2023 Audited PT. ASABRI (Persero) tanggal 29 Februari 2024 disebutkan bahwa saldo AIP PT. ASABRI (Persero) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp27.789.462.568.147

b. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada DJKN per 31 Desember 2023 berasal dari Aset Eks Pertamina sebesar Rp587.493.062. Hingga akhir 2022 eksisting kewajiban jangka panjang sebesar Rp846.741.223. Kemudian sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat transaksi sebagai berikut:
   1) Koreksi reklasifikasi Kewajiban Jangka Panjang menjadi Pendapatan Diterima di Muka Sewa Bass Oil, karena penghitungan saat reklasifikasi Kewajiban Jangka Penjang ke Pendapatan Diterima Dimuka sebelumnya menggunakan 44 bulan, seharusnya 43 bulan. Sehingga dilakukan koreksi pengurangan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp1.148.626;
   2) Reklasifikasi Kewajiban Jangka Panjang menjadi Kewajiban Jangka Pendek Sewa KCP Prabumulih Rp69.060.000;

3) Reklasifikasi Kewajiban Jangka Panjang menjadi Kewajiban Jangka Pendek Sewa Bank Mandiri Palembang Sudirman Rp136.600.000;
4) Reklasifikasi Kewajiban Jangka Panjang menjadi Kewajiban Jangka Pendek Sewa PT PLN 50 Rp1.900.000;
5) Reklasifikasi Kewajiban Jangka Panjang menjadi Kewajiban Jangka Pendek Sewa Bass Oil Rp50.539.535.

Sehingga jumlah kewajiban jangka panjang hingga 31 Desember 2023 sebesar Rp587.493.062.

D.2.2.2.7. UTANG JANGKA PANJANG PINJAMAN LUAR NEGERI

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp886.277.290.731.920 dan Rp822.838.479.742.048 atau mengalami kenaikan sebesar Rp63.438.810.989.872 (7,71%). Peningkatan tersebut terjadi karena adanya peningkatan penarikan Pinjaman Tunai dengan pertimbangan fleksibilitas instrumen utang tunai dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN dan adanya opsi fleksibilitas pembiayaan utang sesuai dengan pasal 32 UU APBN 2023 dimana pemerintah dapat merubah komposisi instrumen pembiayaan utang dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal, dengan mempertimbangkan ketersediaan instrumen utang.

Akun	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri					
222115	Utang Program	496.507.150.437.946	467.695.863.960.429	28.811.286.477.517	6,16
222116	Utang Proyek	389.770.140.293.974	355.142.615.781.619	34.627.524.512.355	9,75
Jumlah		**886.277.290.731.920**	**822.838.479.742.048**	**63.438.810.989.872**	**7,71**

D.2.2.2.8. UTANG JANGKA PANJANG LUAR NEGERI LAINNYA

Nilai utang jangka panjang luar negeri lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp26.579.390.708 dan Rp26.646.297.359 atau mengalami penurunan sebesar Rp66.906.651 (0,25%).

Kewajiban berasal dari utang jangka panjang luar negeri lainnya. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 tidak terdapat tagihan pencairan utang. Kewajiban jangka panjang pada Lembaga Keuangan Internasional IDA. MIGA dan CFC berupa *promissory notes*. Penurunan saldo utang jangka panjang berasal dari perubahan nilai tukar.

Rincian kewajiban sebagai berikut:

No	Investasi Permanen	Mata Uang Awal		31 Des 2023	31 Des 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	International Development Association (IDA)	IDR	5.237.901.545	5.237.901.545	5.237.901.545	-	-
2	Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)	USD	1.135.018	17.523.542.902	17.697.200.656	(173.657.754)	(0,98)
3	Common Fund for Commodities (CFC)	EUR	223.450,21	3.817.946.261	3.711.195.158	106.751.103	2,88
Total*				**26.579.390.708**	**26.646.297.359**	**(66.906.651)**	**(0,25)**

*) *Kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp15.439/USD dan Rp17.086,34/EUR*

Detail *promissory note* Pemerintah Indonesia pada IDA adalah sebagai berikut:

No	Rincian	Tanggal	Jumlah
1	2 (two) promissory notes	19 Januari 1973	129.523.754
2	1 (one) promissory note	21 September 1973	355.340.804
3	1 (one) promissory note	26 Desember 1973	71.956.501
4	1 (one) promissory note	25 Mei 1974	514.542.829
5	1 (one) promissory note	14 Juli 2000	2.163.936.250
6	1 (one) promissory note	22 Mei 2003	2.002.601.407
Total			**5.237.901.545**

D.2.3. EKUITAS

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar minus Rp3.328.187.950.388.477 dan minus Rp3.262.260.267.295.775 atau mengalami penurunan sebesar Rp65.927.683.092.702 (2,02%)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Ekuitas	(3.328.187.950.388.477)	(3.262.260.267.295.775)	(65.927.683.092.702)	(2,02)

D.3. CATATAN PENTING LAINNYA

D.3.1. BA 999.00

D.3.1.1. Rekening Pemerintah Lainnya

Rekening Pemerintah Lainnya terdiri dari 2 (dua) jenis rekening pada Bank Indonesia (Rekening Migas dan Rekening Penerimaan Panas Bumi) dan rekening pada Bank Umum (Rekening Kredit Program dan Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN). Adapun tujuan dari pembukaan Rekening Pemerintah Lainnya adalah sebagai berikut:

1. **Rekening Lain BI Penerimaan dan Pengeluaran Migas Nomor 600.000411980**

   Rekening Lain BI Penerimaan dan Pengeluaran Migas Nomor 600.000411980 pada Bank Indonesia adalah rekening dalam valuta USD untuk menampung penerimaan dan membayar pengeluaran terkait kegiatan usaha hulu migas. Penerimaan yang ditampung pada rekening tersebut masih mengandung hak pihak ketiga yang harus diperhitungkan dari rekening tersebut.

   Saldo Rekening Hasil Minyak Perjanjian Kontrak Production Sharing (KPS) atau rekening Migas per tanggal 31 Desember 2023 (Audited) adalah sebesar USD94.982.920,40 atau ekuivalen sebesar Rp1.466.441.308.055,60. Dana tersebut merupakan Kas BUN dalam bentuk valuta asing pada Rekening Nomor 600.000.411980, sebagai rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas Pemerintah serta membayar kewajiban-kewajiban Pemerintah lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas.

   Pemindahbukuan dari rekening 600.000411980 ke RKUN/KKKS/Pemda didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran yang didahului dengan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan. Mutasi Rekening Migas selama periode Tahun 2023 sebagai berikut:

Mutasi Rekening Nomor 600.000.411980 periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 Desember 2023 (Audited)		31 Desember 2022 *(Audited)*	
	USD	RpJuta	USD	RpJuta
I. Saldo Awal	**231.869.842,68**	**3.615.314,59**	**316.746.439,48**	**4.522.505,66**
II. Penerimaan:				
1. Penerimaan PNBP SDA Migas dan PNBP Lainnya	2.913.888.068,63	44.321.476,60	3.073.324.604,32	45.667.074,58
2. Koreksi Pembukuan Kredit oleh BI	248.834,38	3.742,54	2.405,75	35,8
3. Penerimaan Lain-lain	26.141.048,16	407.692,46	258.453,90	4.040,37
4. Retur/Pengembalian karena Salah Rekening	60.974,00	914,79	74.957,86	1.113,72
5. Selisih Kurs Pembukuan Kredit	-	3.146.518,55	- -	3.519.130,49
Total Penerimaan	**2.940.338.925,17**	**47.880.344,94**	**3.073.660.421,83**	**49.191.394,96**
III. Pengeluaran:				
1. Pengeluaran Berkaitan dengan APBN/ APBD:				
a. PBB Migas ke DJP	688.151.896,52	10.634.943,10	566.568.706,40	8.584.829,81
b. Pajak Penerangan Jalan Non PLN & ABT ke Pemda	1.129.124,09	17.167,82	1.027.212,50	14.990,66
c. Pemindahbukuan ke Rek. Valas KUN Nomor 600.502411980				
• Pendapatan dari PNBP SDA Migas	-	-	-	-
• Pendapatan dari PNBP Migas Lainnya	1.724.999,18	26.592,59	17.731.473,47	277.657,14
Subtotal Pengeluaran Berkaitan dengan APBN/APBD	691.006.019,80	10.678.703,50	585.327.392,37	8.877.477,61
2. Pengeluaran non APBN/APBD:				
• Pembayaran *Reimbursement* PPN KKKS	553.746.491,87	8.434.214,80	436.017.865,70	6.509.641,58
• Pembayaran DMO *Fee* KKKS	590.228.339,36	9.038.475,77	849.199.258,55	12.747.652,55
• Pembayaran *Underlifting* KKKS	1.166.938.343,88	17.885.297,12	1.010.447.192,88	15.429.489,77
• Pembayaran *Fee* Penjual Migas	74.996.844,17	1.131.670,62	277.467.945,52	4.042.870,40
Subtotal Pengeluaran Non APBN/APBD	2.385.910.019,28	36.489.658,32	2.573.132.262,65	38.729.654,30
3. Koreksi Pembukuan Debit oleh BI	248.834,38	3.742,54	2.405,75	35,8
4. Retur/Pengembalian karena Salah Rekening	60.974,00	936,07	74.957,86	1.125,19
5. Pengeluaran Lainnya	-	-	-	-
6. Selisih Koreksi Kurs Pembukuan Debit	-	2.856.177,78	-	2.490.293,14
Total Pengeluaran	**3.077.225.847,45**	**50.029.218,22**	**3.158.537.018,63**	**50.098.586,04**
IV. Kenaikan/Penurunan (II - III)	**(136.886.922,28)**	**(2.148.873,28)**	**-84.876.596,80**	**-907.191,08**
V. Saldo Akhir (I + IV)	**94.982.920,40**	**1.466.441,31**	**231.869.842,68**	**3.615.314,59**

Penjelasan:

1) Penerimaan di Rekening Migas yang meliputi PNBP SDA Migas dan PNBP Migas lainnya merupakan penerimaan Negara dari hasil penjualan lifting minyak dan gas bumi bagian Negara, Overlifting KKKS, serta setoran atas penerimaan non-lifting migas sebesar USD2.912.314.870,09 atau setara Rp44.297.595.783.856.
2) Koreksi Pembukuan oleh BI merupakan koreksi atas pendebetan dua kali transaksi di Rekening Migas sebesar USD248.834,38 atau setara Rp3.742.536.635,31. Atas transaksi tersebut, masing-masing telah dilakukan koreksi pembukuan debit dan kredit oleh BI.
3) Penerimaan Lain-lain merupakan Penerimaan Belum Jelas Peruntukannya (BJP) sebesar USD26.141.048,16 atau setara dengan Rp407.692.455.705 adalah penerimaan yang belum dapat diklasifikasikan baik penyetor maupun peruntukannya sampai dengan saat penyusunan laporan keuangan.
4) Retur merupakan dana yang dikembalikan ke Rekening Migas atas transaksi pembayaran kewajiban Pemerintah yang diretur/dikembalikan karena kesalahan administrasi atau kesalahan data pada rekening penerima. Nilai retur tersebut terdiri dari dana yang dikembalikan atas retur penyelesaian DMO Fee sebesar USD60.974,00 atau setara Rp914.792.922.
5) Selisih Kurs Pembukuan Kredit dan Debit sebesar Rp3.146.518.554.498,95 dan Rp2.856.177.784.803,66 merupakan selisih kurs pada pembukuan Bank Indonesia akibat dari

perubahan kurs transaksi harian dengan kurs neraca yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Selisih kurs ini terjadi karena transaksi di rekening migas Nomor 600.000411980 dalam satuan mata uang US Dollar sedangkan pembukuan harian Bank Indonesia dalam Rupiah. Koreksi selisih kurs ini tidak berpengaruh pada saldo penerimaan migas.

Dampak Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu

Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) diberlakukan berdasarkan Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2016 jo. No. 121 Tahun 2021 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Penetapan HGBT diperuntukkan bagi pengguna Gas Bumi yang bergerak di bidang: 1) industri pupuk, 2) industri petrokimia, 3) industri oleochemical, 4) industri baja, 5) industri keramik, 6) industri kaca, 7) industri sarung tangan karet, serta 8) penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Penetapan HGBT dilakukan melalui penyesuaian harga gas bumi yang dibeli dari kontraktor atau tarif penyaluran gas bumi, yang menyebabkan penurunan harga gas bumi di sejumlah KKKS yang memberlakukan HGBT.

Berdasarkan data resume rekapitulasi yang diperoleh dari SKK Migas, terhadap KKKS yang berada dalam kewenangan SKK Migas, pada tahun 2023 dan tahun 2022 terjadi penurunan bagian Pemerintah yang disebabkan oleh penyesuaian atas perubahan harga gas masing-masing sebesar USD431,650,792 atau ekuivalen Rp6.664.256.577.427 dan USD610,886,737 atau ekuivalen Rp9.524.945.996.155. Sedangkan nilai penyesuaian untuk mempertahankan bagian KKKS (kept-whole) pada tahun 2023 dan tahun 2022 masing-masing sebesar USD736,130,731 atau ekuivalen Rp11.365.122.358.850 dan USD1,023,063,144 atau ekuivalen Rp15.951.600.539.740. Adapun realisasi kewajiban pemerintah pada tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp7.305.320.925.338 dan Rp3.075.963.489.095. Maka dengan memperhitungkan kewajiban pemerintah dan penyesuaian HGBT, nilai akhir penerimaan bagian pemerintah pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp14.385.151.490.257 atau menurun dari tahun 2022 yang mencapai Rp23.680.703.837.470.

Pada tahun 2021 dan 2020, penurunan bagian Pemerintah yang disebabkan oleh penyesuaian atas perubahan harga gas masing-masing sebesar USD449,268,404 atau ekuivalen Rp6.414.654.267.188 dan USD174,605,350 atau ekuivalen Rp2.462.808.461.727; sedangkan nilai penyesuaian untuk mempertahankan bagian KKKS (kept-whole) masing-masing sebesar USD741,217,494 atau ekuivalen Rp10.583.103.372.807 dan USD279,465,750 atau ekuivalen Rp3.941.864.407.431. Adapun realisasi kewajiban pemerintah pada tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp6.131.465.924.649 dan Rp5.204.357.297.105. Maka dengan memperhitungkan kewajiban pemerintah dan penyesuaian HGBT, nilai akhir penerimaan bagian pemerintah pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp17.866.639.329.264 atau meningkat dari tahun 2020 yang hanya mencapai Rp16.363.637.258.001.

Pada data penyesuaian bagian negara untuk KKKS PHE NSO tahun 2021 dan 2020, nilai kept-whole bagian KKKS belum dapat ditagihkan karena masih terdapat ketidakcukupan bagian negara. Data penyesuaian bagian negara pada KKKS PHE NSO merupakan perhitungan sementara, di mana perhitungan bagi hasil WK NSO untuk tahun 2020 dan 2021 belum dapat difinalkan karena masih terdapat ketidakcukupan bagian Pemerintah untuk mengkept-whole bagian KKKS, dan akan ditindaklanjuti dengan penyesuaian dari sisi harga dan/atau volume atas penjualan gas WK NSO yang mengimplementasikan kebijakan HGBT sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Adapun nilai kekurangan bagian KKKS PHE NSO yang tidak tertutupi oleh bagian pemerintah tahun 2020 adalah sebesar USD296.065,01 atau ekuivalen Rp4.175.997.001, sedangkan tahun 2021 adalah sebesar USD1.053.990,75 atau ekuivalen Rp15.048.879.940.

Besaran bagian Pemerintah yang terdampak oleh kebijakan HGBT berdasarkan KKKS yang berada dalam kewenangan SKK Migas secara rinci dapat dilihat Perhitungan Penyesuaian Bagian Negara pada SKK Migas Tahun 2023 yang disajikan pada Lampiran LDCPL1.

Sementara itu, berdasarkan data resume rekapitulasi yang diperoleh dari BPMA, terhadap KKKS yang berada dalam kewenangan BPMA, pada tahun 2023 dan tahun 2022 terjadi penurunan bagian Pemerintah yang disebabkan oleh penyesuaian atas perubahan harga gas masing-masing sebesar USD224,000 atau ekuivalen Rp3.458.340.691 dan USD439,722 atau ekuivalen Rp6.856.148.650. Sedangkan nilai penyesuaian untuk mempertahankan bagian KKKS (kept-whole) pada tahun 2023 dan tahun 2022 masing-masing sebesar USD3,135,987 atau ekuivalen Rp48.416.510.302 dan USD6,156,078 atau ekuivalen Rp95.985.566.897. Adapun realisasi kewajiban pemerintah pada tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.135.779.299 dan Rp8.577.758.915. Maka dengan memperhitungkan kewajiban pemerintah dan penyesuaian HGBT, nilai akhir penerimaan bagian pemerintah pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp26.287.828.954 atau menurun dari tahun 2022 yang mencapai Rp39.712.476.945.

Selain itu, pada tahun 2021 dan 2020 penurunan bagian Pemerintah yang disebabkan oleh penyesuaian atas perubahan harga gas masing-masing sebesar USD329,235 atau ekuivalen Rp4.700.821.802 dan USD228,433 atau ekuivalen Rp3.222.044.251; sedangkan nilai penyesuaian untuk mempertahankan bagian KKKS (kept-whole) masing-masing sebesar USD4,609,270 atau ekuivalen Rp65.811.152.672 dan USD1,814,347 atau ekuivalen Rp25.591.368.636. Adapun realisasi kewajiban pemerintah pada tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp25.779.665.891 dan Rp94.397.142.981. Maka dengan memperhitungkan kewajiban pemerintah dan penyesuaian HGBT, nilai akhir penerimaan bagian pemerintah pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp37.092.888.344 atau menurun dari tahun 2020 yang mencapai Rp76.918.815.925.

Di samping itu, pada tahun 2020 terdapat nilai kekurangan bagian KKKS Medco E&P Malaka yang tidak tertutupi oleh bagian pemerintah, yang penyelesaiannya akan ditindaklanjuti dengan penyesuaian dari sisi harga dan/atau volume atas penjualan gas yang mengimplementasikan kebijakan HGBT sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, dengan nilai sejumlah USD1.285.635,16 atau ekuivalen Rp18.133.883.933.

Besaran bagian Pemerintah yang terdampak oleh kebijakan HGBT berdasarkan KKKS yang berada dalam kewenangan BPMA secara rinci dapat dilihat Perhitungan Penyesuaian Bagian Negara pada BPMA Tahun 2023 yang disajikan pada Lampiran LDCPL2.

Dengan mengakumulasikan seluruh KKKS di bawah kewenangan SKK Migas dan BPMA, maka total nilai kewajiban pemerintah, penyesuaian HGBT, dan bagian negara akhir ditunjukkan pada tabel berikut:

Rincian	2020	2021	2022	2023
(1) Bagian negara awal (sebelum HGBT)	28.172.796.796.057	41.129.247.422.618	52.384.345.813.866	39.801.149.811.117
(2) Kewajiban pemerintah terhadap Kontraktor	5.298.754.440.086	6.157.245.590.541	3.084.541.248.010	7.308.456.704.637
(3) Bagian negara setelah memperhitungkan kewajiban pemerintah [3 = 1 - 2]	22.874.042.355.971	34.972.001.832.077	49.299.804.565.857	32.492.693.106.480
(4) Penyesuaian HGBT (*kept-whole* kontraktor + penurunan *entitlement* GOI akibat HGBT)	6.433.486.282.045	17.068.269.614.469	25.579.388.251.442	18.081.253.787.269
(5) Bagian negara akhir atau setelah HGBT [5 = 3 - 4]	16.440.556.073.927	17.903.732.217.609	23.720.416.314.415	14.411.439.319.211
(6) Proporsi penyesuaian bagian negara [6 = 4 / 3]	28,13%	48,81%	51,89%	55,65%
(7) Kekurangan Bagian Pendapatan KKKS yang Tidak Tertutupi dari *Keptwhole*	22.309.880.934	15.048.879.940	-	-

Lebih lanjut, sejalan dengan ketentuan dalam Kepmen ESDM Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan serta Evaluasi Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri dan di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik bagi Kepentingan Umum, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, SKK Migas, BPMA, serta Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Migas melakukan rekonsiliasi hulu-

hilir atas implementasi HGBT.Berdasarkan hasil rekonsiliasi hulu-hilir atas implementasi HGBT diketahui bahwa terdapat penerimaan bagian negara atas hasil rekonsiliasi hulu-hilir HGBT Tahun 2020-2022 sebesar USD173.602.901.

Rekapitulasi Penerimaan Bagian Negara Atas Hasil Rekonsiliasi Hulu-Hilir HGBT Tahun 2020-2022

Periode	Total Hasil Rekonsiliasi	Penyelesaian Hasil Rekonsiliasi	Saldo yang Belum Terbayar
SKK Migas	173.580.050	169.330.728	4.249.322
BPMA	22.851	22.851	
Total	**173.602.901**	**169.353.579**	**4.249.322**

Sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut, atas nilai penerimaan bagian negara dari hasil rekonsiliasi hulu-hilir HGBT tersebut, dana senilai USD169.353.579 atau ekuivalen Rp2.578.068.992.086 telah dibayarkan melalui rekening migas, dan kemudian telah diterima seluruhnya di Rekening Kas Umum Negara secara utuh melalui mekanisme reklasifikasi. Dengan demikian, realisasi nilai pembayaran atas penerimaan bagian negara dari hasil rekonsiliasi hulu hilir HGBT tersebut mencapai 97,55 persen dari total penerimaan bagian negara atas hasil rekonsiliasi hulu-hilir HGBT Tahun 2020-2022.

Rekapitulasi Penyelesaian dan Reklas Penerimaan Gas Hasil Rekonsiliasi Hulu-Hilir HGBT

Periode	Penyelesaian Hasil Rekonsiliasi			Kurs Reklas	Nilai Penyelesaian Hasil Rekon Hilir HGBT yang Direklas		
	BPMA	SKK Migas	Total		BPMA	SKK Migas	Total
	(dalam USD)			(Rp/USD)	(dalam Rupiah)		
Maret 2023	-	2.247.413,24	2.247.413,240	15.243	-	34.256.196.310,70	34.256.196.311
Juli 2023	-	992.415,48	992.415,480	15.066	-	14.951.672.372,99	14.951.672.373
Oktober 2023	-	80.129.953	80.129.952,695	15.190	-	1.217.173.981.437,10	1.217.173.981.437
Desember 2023	22.851	85.960.946	85.983.797,102	15.255	348.587.965,61	1.311.338.553.999,21	1.311.687.141.965
TOTAL	**22.851**	**169.330.728**	**169.353.579**		-	**2.577.720.404.120**	**2.578.068.992.086**

Skema penyelesaian atas transaksi yang timbul dari penyesuaian pengurangan penerimaan bagian negara adalah dengan diperhitungkan melalui mekanisme bagi hasil sesuai Kontrak Kerja Sama suatu Wilayah Kerja.

2. Rekening SDA Non Migas, Nomor 508.000084.980 Rekening Penerimaan Panas Bumi

Rekening Lain pada Bank Indonesia Penerimaan dan Pengeluaran Panas Bumi 508.000084980 digunakan untuk menampung penerimaan setoran bagian Pemerintah dan untuk membayar pengeluaran kewajiban pemerintah terkait usaha panas bumi, antara lain reimbursement PPN, PBB, dan penggantian bonus produksi. Pemindahbukuan dari rekening 508.000084980 ke RKUN/ rekening Pengusaha Panas Bumi didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran yang didahului dengan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

Saldo Rekening Panas Bumi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.912.870.273.099 dan Rp1.588.329.504.770. Berikut adalah mutasi Rekening Panas Bumi:

No	URAIAN	31 Desember 2023 *(Audited)*	31 Desember 2022 *(Audited)*
I.	**Saldo Awal**	**1.588.329.504.770**	**1.428.552.738.965**
II.	**Penerimaan:**		
	1. Setoran Bagian Pemerintah dari Kegiatan Usaha Panas Bumi	3.727.920.311.039	2.944.542.106.880
	2. Koreksi Pembukuan Kredit		
	Total Penerimaan	**3.727.920.311.039**	**2.944.542.106.880**
III.	**Pengeluaran:**		

No	URAIAN	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
	1. Pembayaran PBB Panas Bumi [a)]	439.988.647.320	400.171.960.144
	2. Pembayaran Kembali PPN kepada Pengusaha Panas Bumi [b)]	175.871.851.026	147.221.743.521
	3. Pembayaran penggantian bonus produksi kepada pengusaha Pabum [c)]	93.180.322.346	90.658.226.036
	4. Pemindahbukuan PNBP Pengusahaan Panas Bumi ke Rek. KUN [d)]	2.694.338.722.018	2.146.713.411.374
	5. Koreksi Pembukuan debit		
	Total Pengeluaran	**3.403.379.542.710**	**2.784.765.341.075**
IV.	**Kenaikan/Penurunan (II - III)**	**324.540.768.329**	**159.776.765.805**
V.	**Saldo Akhir (I + IV) [e)]**	**1.912.870.273.099**	**1.588.329.504.770**

Penjelasan:

a. Pembayaran PBB Panas Bumi tahun 2023 sebesar Rp439.988.647.320.

b. Pembayaran kembali (reimbursement) PPN kepada Pengusaha panas bumi sebesar Rp175.871.851.026 adalah reimbursement PPN dengan perincian: (1) Pengajuan Tahun 2020 sebesar Rp2.520.463.220 (2) Pengajuan Tahun 2021 sebesar Rp22.282.293.630 (3) Pengajuan Tahun 2022 sebesar Rp107.851.355.157 dan (4) Pengajuan Tahun 2023 sebesar Rp43.217.739.019.

c. Pembayaran penggantian bonus produksi kepada pengusaha panas bumi sebesar Rp93.180.322.346 dengan rincian sebagai berikut:

Penggantian Bonus Produksi Tahun	Jumlah
2017	1.529.136.314
2018	1.607.812.843
2019	417.885.474
2020	1.178.566.490
2021	529.169.660
2022	47.060.603.102
2023	40.857.148.463
Total	**93.180.322.346**

d. Pemindahbukuan PNBP Panas Bumi Tahun 2023 ke RKUN sebesar Rp2.694.338.722.018 terdiri dari:
   1) PNBP Panas Bumi Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp196.010.334.104.
   2) PNBP Panas Bumi Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp913.355.637.639.
   3) PNBP Panas Bumi Triwulan III Tahun 2023 sebesar Rp847.645.325.773.
   4) PNBP Panas Bumi Triwulan IV Tahun 2022 sebesar Rp737.327.424.502.

e. Saldo rekening 508.000084980 per 31 Desember 2023 merupakan cadangan untuk pembayaran kewajiban reimbursement PPN, penggantian bonus produksi yang terkait dengan kegiatan usaha panas bumi dengan rincian:

No	Pengusaha	*Reimbursement* PPN	Bonus Produksi	Nilai
1.	PT Pertamina Geothermal Energy (Persero)	656.108.692.046	28.992.431.630	685.101.123.676
2.	Star Energy Geothermal Salak, Ltd	338.567.267.576	6.689.075.726	345.256.343.302
3.	Star Energy Geothermal Darajat II, Ltd	346.787.786.142	3.805.458.543	350.593.244.685
4.	Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd	431.940.946.437	3.661.116.975	435.602.063.412
5.	PT Geo Dipa Energi (Persero)	91.581.163.745	4.736.334.269	96.317.498.014
Jumlah*)		**1.864.985.855.946**	**47.884.417.143**	**1.912.870.273.089**

**) Selisih total sebesar Rp10 karena pembulatan*

3. Rekening Investasi Pemerintah PEN (RIPPEN)

RIPPEN merupakan rekening milik BUN yang dibuka di Bank Indonesia pada tahun 2020 berdasarkan KMK 533/KMK.06/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada Rekening Milik BUN. Rekening dengan nomor 5190001518980 tersebut digunakan untuk mengelola dana investasi Pemerintah dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional yaitu untuk menampung pencairan dana, pengembalian pokok, dan pendapatan hasil investasi Pemerintah PEN. Dana investasi Pemerintah tersebut ditujukan kepada penerima investasi sebagaimana diatur dalam KMK 525/KMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 381/KMK.02/2020 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari:

No.	Keperluan	Jumlah
1.	PT Garuda Indonesia (Persero)	8.500.000.000.000
2.	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	3.500.000.000.000
3.	Perum Perumnas	650.000.000.000
4.	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	4.000.000.000.000
5.	PT Krakatau Steel (Persero)	3.000.000.000.000
Jumlah		**19.650.000.000.000**

Realisasi RIPPEN Tahun 2020-2022

Sampai dengan Tahun 2022, rincian realisasi investasi pemerintah yang telah disalurkan kepada penerima investasi adalah senilai Rp10.302.480.860.411 dengan rincian:

No.	Keperluan	Jumlah
Realisasi 2020		
1.	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	3.500.000.000.000
2.	Perum Perumnas	200.000.000.000
3.	PT Krakatau Steel (Persero)	2.200.000.000.000
Realisasi 2021		
1.	PT Garuda Indonesia (Persero)	1.000.000.000.000
2.	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	627.409.598.719
3.	Perum Perumnas	450.000.000.000
4.	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	180.267.213.112
5.	PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)	832.697.430.784
6.	PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)	110.963.117.796
Realisasi 2022		
1.	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	685.588.236.151
2.	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	290.343.076.582
3.	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	225.212.187.267
Jumlah		**10.302.480.860.411**

Saldo RIPPEN per 31 Desember 2022 yang dilaporkan dalam LKPP 2022 Audited adalah sebesar Rp4.847.519.139.589.

Realisasi RIPPEN Semester I Tahun 2023

Pada semester I tahun 2023, terdapat pemindahbukuan dari RIPPEN ke Rek Lain BI Penampungan Dana PMN sebesar Rp3.000.000.000.000 yang merupakan dana titipan Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tanggal 4 Oktober 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya TBK dan KMK Nomor 519/KMK.06/2022 tentang Penempatan Dana Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk Tahun Anggaran 2022 pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara, Pemerintah mengalokasikan dana penyertaan modal negara ke dalam modal saham PT Waskita Karya Tbk paling banyak sebesar Rp3.000.000.000.000 pada RIPPEN. Berdasarkan KMK Nomor 519/KMK.06/2022 dan Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor ND-62/PB.6/2023 tanggal 20 Januari 2023 hal Petunjuk Teknis Akuntansi 07: Akuntansi Transaksi Penempatan Dana Penyertaan Modal Negara pada Rekening Milik BUN. Atas dana titipan tersebut telah dipindahbukukan pada tanggal 27 Januari 2023 dan dicatat sebagai dana yang dibatasi penggunaannya (akun 163114: Dana untuk Penyertaan Modal Negara/PMN) oleh Kuasa BUN Pusat.

Selain pemindahbukuan atas dana titipan untuk PT Waskita Karya (Persero), pada semester I tahun 2023 terdapat penyaluran dana IP PEN ke PT Krakatau Steel (Persero) dengan nilai Rp800.000.000.000 sesuai Surat KPA Satker BUN Penerima Investasi Berbentuk BUMN nomor S-5/KPA999.03.MBU/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 hal Permohonan Pemindahbukuan dari Rekening Investasi Pemerintah PEN ke Rekening Kas Umum Negara atas Dana Cadangan Investasi Pemerintah PEN untuk PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Atas hal tersebut, dilakukan pemindahbukuan Dana Cadangan IP PEN dari RIPPEN ke RKUN.

Realisasi RIPPEN Semester II Tahun 2023

Pada Semester II tahun 2023, terdapat penyaluran dana IP PEN ke PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan nilai Rp409.617.705.284 sesuai Surat KPA Satker BUN Penerima Investasi Berbentuk BUMN nomor S-19/KPA999.03.MBU/11/2023 tanggal 28 November 2023 hal Pemindahbukuan dari Rekening Investasi Pemerintah PEN ke Rekening Kas Umum Negara atas Dana Cadangan Investasi Pemerintah PEN untuk PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Tahun 2023, penyaluran dana IP PEN ke PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan nilai Rp637.901.433.716 sesuai Surat KPA Satker BUN Penerima Investasi Berbentuk BUMN nomor S-22/KPA999.03.MBU/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 hal Pemindahbukuan dari Rekening Investasi Pemerintah PEN ke Rekening Kas Umum Negara atas Dana Cadangan Investasi Pemerintah PEN untuk PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Tahun 2023 serta penihilan dana IP PEN ke PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan nilai Rp589 sesuai Surat KPA Satker BUN Penerima Investasi Berbentuk BUMN nomor S-26/KPA999.03.MBU/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 hal Permintaan Penihilan Rekening Investasi Pemerintah PEN atas Dana Cadangan Investasi Pemerintah PEN untuk PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Atas hal tersebut, dilakukan pemindahbukuan Dana Cadangan IP PEN dari RIPPEN ke RKUN, sehingga saldo atas RIPPEN per 31 Desember 2023 adalah Rp0 atau nihil.

Berdasarkan penjelasan di atas, rincian saldo pada RIPPEN s.d. 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Saldo RIPPEN per 31 Desember 2022	4.847.519.139.589
2.	Pemindahbukuan dana titipan ke Rek Lain BI Penampungan Dana PMN	(3.000.000.000.000)
3.	Pemindahbukuan ke RKUN atas penyaluran dana IP PEN ke PT Krakatau Steel	(800.000.000.000)
4.	Saldo RIPPEN per 31 Juni 2023	1.047.519.139.589
5.	Pemindahbukuan ke RKUN atas penyaluran dana IP PEN ke PT Perkebunan Nusantara III	(409.617.705.284)
6.	Pemindahbukuan ke RKUN atas penyaluran dana IP PEN ke PT Perkebunan Nusantara III	(637.901.433.716)
7.	Penihilan ke RKUN atas penyaluran dana IP PEN ke PT Perkebunan Nusantara III	(589)
8.	Realisasi RIPPEN Tahun 2023	1.847.519.139.589
Saldo RIPPEN Per 31 Desember 2023		**0**

Berdasarkan rincian saldo RIPPEN diatas, sesuai dengan ketentuan pada pasal 21A ayat (4) PMK Nomor 189/PMK.06/2021 diatur bahwa KPA BUN mengajukan penutupan RIPPEN setelah seluruh dana Investasi Pemerintah PEN selesai ditempatkan pada penerima investasi. Berdasarkan hal tersebut Rekening RIPPEN telah dilakukan penutupan sesuai dengan Surat KPA BUN nomor S-1/KPA999.03.MBU/01/2024 tanggal 8 Januari 2024 dan Surat Kepala Divisi Departemen Jasa Perbankan, Perizinan dan Operasional Tresuri Bank Indonesia nomor No.26/ 26 /DPPT-GKPP-LJP/Srt/B tanggal 18 Januari 2024.

4. Rekening Lainnya di BI TDF-TKD Pemda

Sesuai PMK Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, penyaluran transfer ke daerah (TKD) yang mencakup Dana Bagi Hasil (DBH) dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU) dapat dilakukan dalam bentuk nontunai berupa Treasury Deposit Facility (TDF). TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh BUN bagi pemerintah daerah (pemda) untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI). Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai berupa TDF dilakukan dalam rangka meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang sehat, efisien, dan efektif melalui pengendalian kas untuk mengoptimalkan belanja pemerintah, serta untuk mengurangi kas simpanan pemda di perbankan dalam jumlah tidak wajar.

Dalam rangka penyimpanan DBH dan/atau DAU yang disalurkan dalam bentuk nontunai berupa TDF pada BI, Kuasa BUN Pusat telah membuka 542 rekening lain BI TDF-TKD Pemda berdasarkan permohonan KPA BUN Pengelolaan DTU di Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK). Atas penyimpanan dana dalam rekening lain BI TDF-TKD Pemda tersebut, BI memberikan remunerasi sesuai kesepakatan antara Menteri Keuangan dengan Gubernur BI, dimana remunerasi tersebut ditransfer oleh BI ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) secara bulanan. Ketentuan mengenai pembentukan dan pengelolaan TDF dalam rangka penyaluran DBH TA 2022 dalam bentuk nontunai diatur dalam KMK Nomor 10/KM.5/2022, di mana pengisian rekening lain BI TDF-TKD Pemda didahului dengan penerbitan SPM nihil penyaluran DBH nontunai oleh KPA BUN Penyaluran DTU yang diajukan Bersama dokumen

pendukungnya ke KPPN Jakarta II. Berdasarkan SPM tersebut, KPPN Jakarta II menerbitkan SP2D nihil penyaluran DBH nontunai, dilanjutkan dengan pemindahbukuan dana oleh Kuasa BUN Pusat dari RKUN ke rekening lain BI TDF-TKD Pemda. Alur penyaluran DBH nontunai berupa TDF adalah sebagaimana gambar berikut:

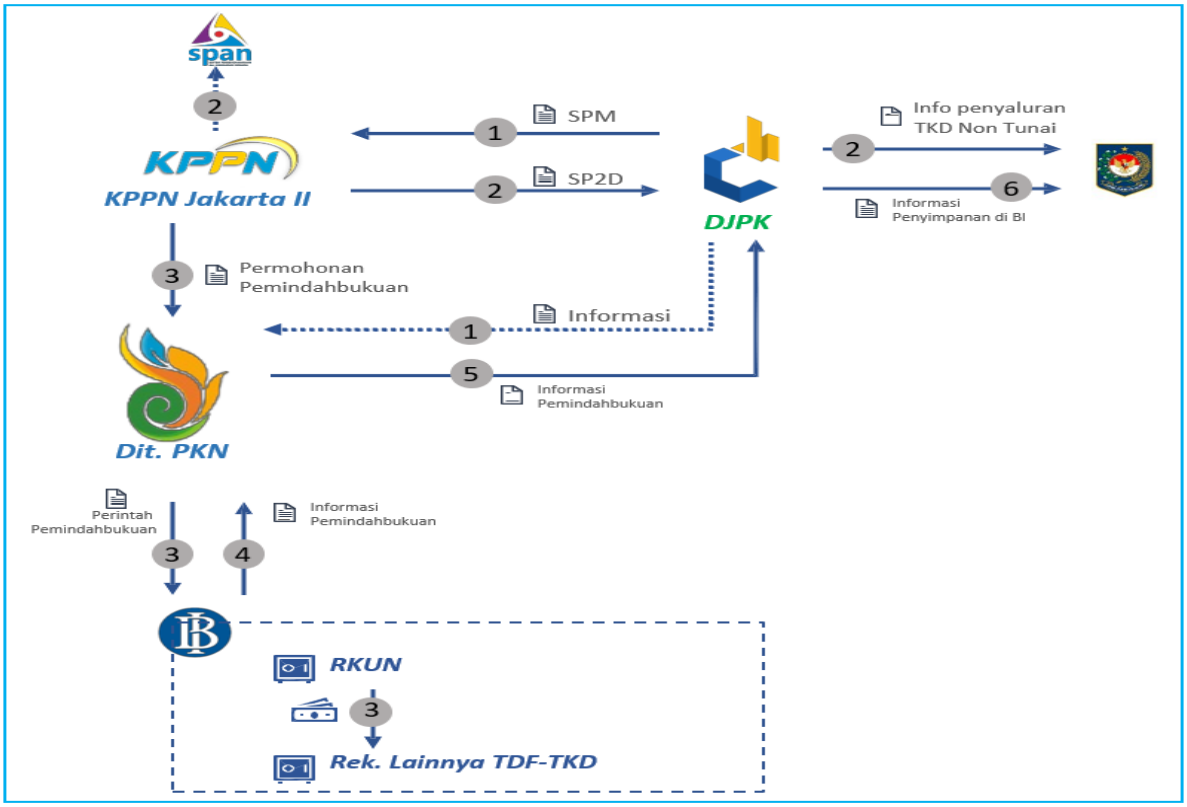

Realisasi TDF pada tahun 2022

Selama tahun 2022, telah dilakukan penyaluran DBH nontunai berupa TDF kepada 542 pemda dengan total nilai Rp25.132.963.282.524 dalam 3 tahap berdasarkan KMK Nomor 46/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana bagi Hasil Periode Ketiga Pada Tahun 2022 serta PMK Nomor 215/PMK.07/2022 dan PMK Nomor 218/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022. Adapun rincian tahapan penyaluran DBH nontunai berupa TDF selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tahap	Tanggal	Nilai (Rp)	Jumlah Pemda Penerima	Keterangan
I	29 Desember 2022	5.536.859.393.355	52	Penyaluran kurang bayar DBH tahun 2021
II	30 Desember 2022	12.168.344.332.000	542	Penyaluran perubahan rincian DBH tahun 2022
III	30 Desember 2022	7.427.759.557.169	133	Penyaluran DBH reguler tahun 2022
Total		**25.132.963.282.524**		

Terhadap penyimpanan dana dalam rekening lain BI TDF-TKD Pemda tersebut, sampai dengan 31 Desember 2022 telah diterima remunerasi dengan nilai total **Rp6.766.936.306** pada RKUN.

Realisasi TDF pada Semester I tahun 2023

Sampai dengan semester I tahun 2023 telah dilakukan penarikan DBH nontunai berupa TDF kepada 542 pemda dengan total sebesar Rp13.013.685.229.269 dalam IV tahap. Adapun rincian tahapan penarikan DBH non tunai berupa TDF selama semester I tahun 2023 sebagai berikut:

Tahap	Tanggal	Nilai (Rp)	Jumlah Pemda	Keterangan
I	11 April 2023	807.081.149.891	436	Penarikan DBH (Cukai Hasil Tembakau, Kehutanan Dana Reboisasi serta Tambahan Migas Otsus) setelah *holding period* Berdasarkan PMK 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui TDF
II	12 April 2023	83.336.251.053	1	Berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelolaan DTU No 322/PK.2/2023 tgl 6 April 2023 tentang Rekomendasi Penyaluran Dana TDF untuk DBH Kab. Banyuasin
III	14 April 2023	12.121.273.222.000	541	Berdasarkan KMK 138 Tahun 2023 tentang Penarikan Dana Treasury Deposit Facility dalam rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah sebagai akibat dari Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
IV	23 Juni 2023	1.994.606.325	1	Berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelolaan DTU No 629/PK.2/2023 tgl 20 Juni 2023 tentang Rekomendasi penyaluran dana TDF untuk Dana Bagi hasil Kab. Batu Bara
Total		**13.013.685.229.269**		

Saldo akhir dalam rekening lain BI TDF-TKD Pemda per semester I tahun 2023 sebesar Rp12.119.278.053.255.

Realisasi TDF pada Triwulan III tahun 2023

Pada sepanjang Triwulan III tahun 2023 telah dilakukan penarikan DBH nontunai berupa TDF kepada 17 pemda dengan total sebesar Rp601.101.922.081 dalam IV tahap. Adapun rincian tahapan penarikan DBH non tunai berupa TDF selama triwulan III tahun 2023 sebagai berikut:

Tahap	Tanggal	Nilai (Rp)	Jumlah Pemda	Keterangan
V	5 Juli 2023	2.767.180.769	2	Berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelolaan DTU No ND-693/PK.2/2023 tanggal 3 Juli 2023 (Rekomendasi Penyaluran Dana TDF untuk DBH Kota Sawahlunto) dan Nomor ND-694/PK.2/2023 tanggal 3 Juli 2023 (Rekomendasi Penyaluran Dana TDF untuk DBH Kabupaten Tulang Bawang Barat
VI	6 Juli 2023	3.185.984.870	1	Berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelolaan DTU No ND-638/PK.2/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekomendasi Penyaluran Dana TDF untuk DBH Kota Banjar
VII	13 Juli 2023	2.813.910.650	1	Berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelolaan DTU No ND-737/PK.2/2023 tanggal 7 Juli 2023

Tahap	Tanggal	Nilai (Rp)	Jumlah Pemda	Keterangan
				tentang Rekomendasi Penyaluran Dana TDF untuk DBH Kab. Kubu Raya
VIII	25 Juli 2023	6.480.842.210	1	Berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelolaan DTU No ND-769/PK.2/2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang Rekomendasi Penyaluran Dana TDF untuk Dana Bagi Hasil Kabupaten Blora
IX	8 Agustus 2023	10.869.029.694	1	Berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelolaan DTU No ND-829/PK.2/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Rekomendasi Penyaluran Dana TDF untuk DBH Kab. Karimun
X	15 Agustus 2023	10.311.270.327	1	Berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelolaan DTU No ND-851/PK.2/2023 tanggal 10 Agustus 2023 tentang Rekomendasi Penyaluran Dana TDF untuk Kota Batam
XI	16 Agustus 2023	10.862.637.368	1	Berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelolaan DTU No ND-864/PK.2/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang Rekomendasi Penyaluran Dana TDF untuk DBH Kab. Ogan Komering Ilir
XII	23 Agustus 2023	186.913.390.079	4	Berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelolaan DTU No ND-876/PK.2/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Rekomendasi Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility (TDF) untuk Kab. Banggai Laut; ND-877/PK.2/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Rekomendasi Penyaluran TDF Kabupaten Bengkalis; ND-880/PK.2/2023 tanggal 20 Agustus 2023 tentang Rekomendasi Penyaluran TDF Kabupaten Kampar dan Indragiri Hilir
XIII	6 September 2023	355.297.016.833	2	Berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelolaan DTU No ND-921/PK.2/2023 tanggal 1 September 2023 hal Rekomendasi Penyaluran Dana TDF untuk Provinsi Riau dan Kabupaten Musi Banyuasin
XIV	8 September 2023	6.660.214.247	1	Berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelolaan DTU No ND-939/PK.2/2023 tanggal 6 September 2023 tentang Rekomendasi Penyaluran Dana TDF Kabupaten Anambas
15	20 September 2023	4.940.445.034	2	Berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelolaan DTU
Total		**601.101.922.081**	**17**	

Saldo akhir dalam rekening lain BI TDF-TKD Pemda per 30 September 2023 sebesar Rp11.518.176.131.174.

Realisasi TDF pada Triwulan IV tahun 2023

Pada sepanjang Triwulan IV tahun 2023 telah dilakukan penarikan DBH nontunai berupa TDF kepada 523 pemda dengan total sebesar Rp11.518.176.131.174 pada tanggal 16 dan 17 Desember 2023 berdasarkan KMK 362 Tahun 2023 tentang Penarikan Dana Treasury Deposit Facility dalam rangka

Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah pada Akhir Tahun Anggaran 2023. Penarikan dana TDF berdasarkan KMK dimaksud merupakan penarikan atas Saldo TDF Tahun 2022, sehingga dana TDF yang berasal dari DBH Nontunai Tahun 2022 telah seluruhnya ditarik.

Selain penarikan DBH, pada bulan Desember 2023 terdapat pengisian TDF yang berasal dari penyaluran DBH Nontunai tahun 2023 untuk 354 Pemda pada tanggal 29 Desember 2023 dengan total realisasi sebesar Rp.16.237.365.176.000.

Pada tanggal yang sama, terdapat pula penarikan DBH non tunai sebesar Rp686.726.766.950. Penarikan tersebut untuk Kab Siak, Provinsi Kepulauan Riau, Kab. Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna. Rincian saldo DBH nontunai tahun 2023 yang disimpan dalam Rekening TDF terdapat pada Lampiran Kas DDP.

Dalam proses pengisian TDF ini masih terdapat SP2D yang sudah diterbitkan pada tanggal 29 s.d. 31 Desember 2023, namun sebagian pengisian TDF telah melewati *Windows Time RTGS/SKN* Bank Indonesia (sistem perbankan yang sudah tidak beroperasional) sehingga baru masuk ke dalam Rekening TDF pada awal Januari 2024 di Bank Indonesia. Jumlah SP2D untuk pengisian DBH tersebut sebesar Rp50.947.693.719.450.

D.3.1.2. Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA)

Saldo RPATA per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.127.520.888.198 pada tahun 2024 telah dilakukan SPM Pembayaran sebesar Rp19.589.609.151.385 dan SPM Penihilan sebesar Rp1.537.911.736.813 sehingga saldo RPATA per 22 April 2024 sudah nihil.

Rincian nilai pembayaran dan penihilan RPATA pada tahun 2024 disajikan pada Lampiran LDCPL3.

Untuk menjaga prinsip pembayaran setelah barang/jasa diterima serta mendukung optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran, dibuka Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) untuk menampung dana dalam rangka penyelesaian pekerjaan tersebut. RPATA merupakan rekening lain-lain milik BUN yang dibuka di Bank Indonesia dengan nomor rekening 519000700980 untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara s.d. tanggal 31 Desember TA berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir TA yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada TA berikutnya. Pengelolaan RPATA berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 109 tahun 2023 menggantikan probis Bank Garansi yang diterapkan sebelumnya. Proses bisnis pengelolaan RPATA sebagai berikut:

a. Proses bisnis Penampungan RPATA yang bersumber dari dana Rupiah Murni (RM)

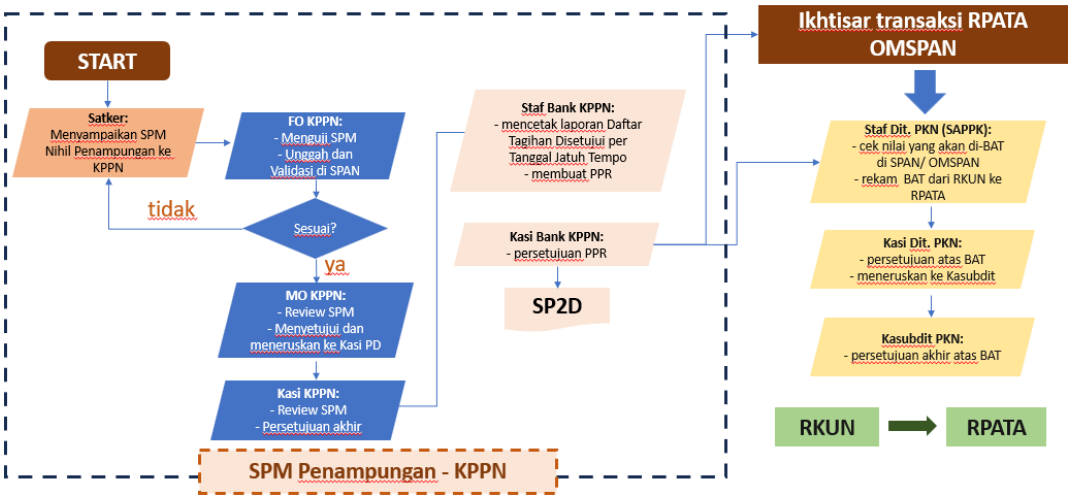

b. Proses bisnis Pembayaran RPATA yang bersumber dari dana Rupiah Murni (RM)

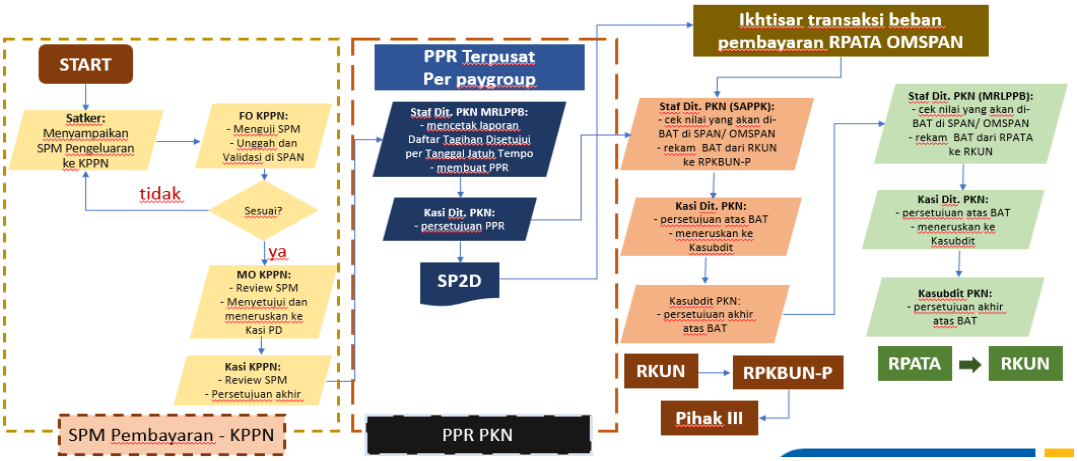

c. Proses bisnis Penihilan RPATA yang bersumber dari dana Rupiah Murni (RM)

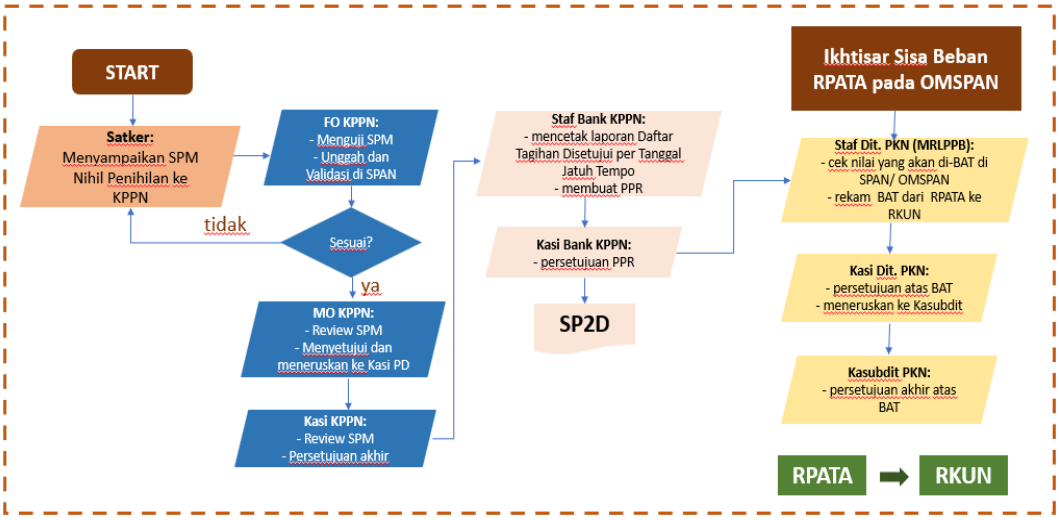

d. Proses bisnis Penampungan, Pembayaran dan Penihilan RPATA yang bersumber dari dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)

e.

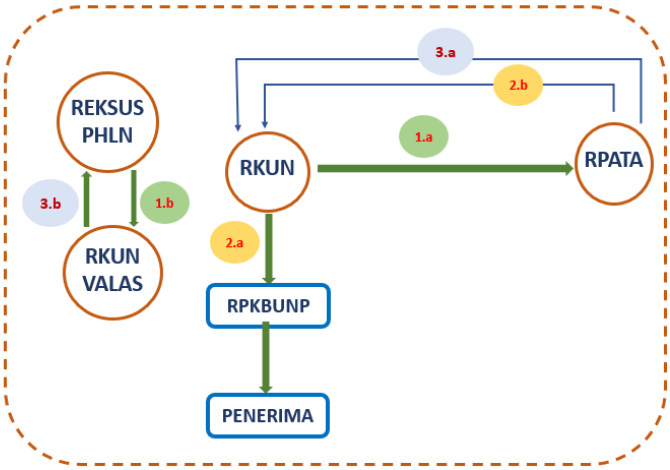

f. Proses bisnis Penampungan, Pembayaran dan Penihilan RPATA yang bersumber dari dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

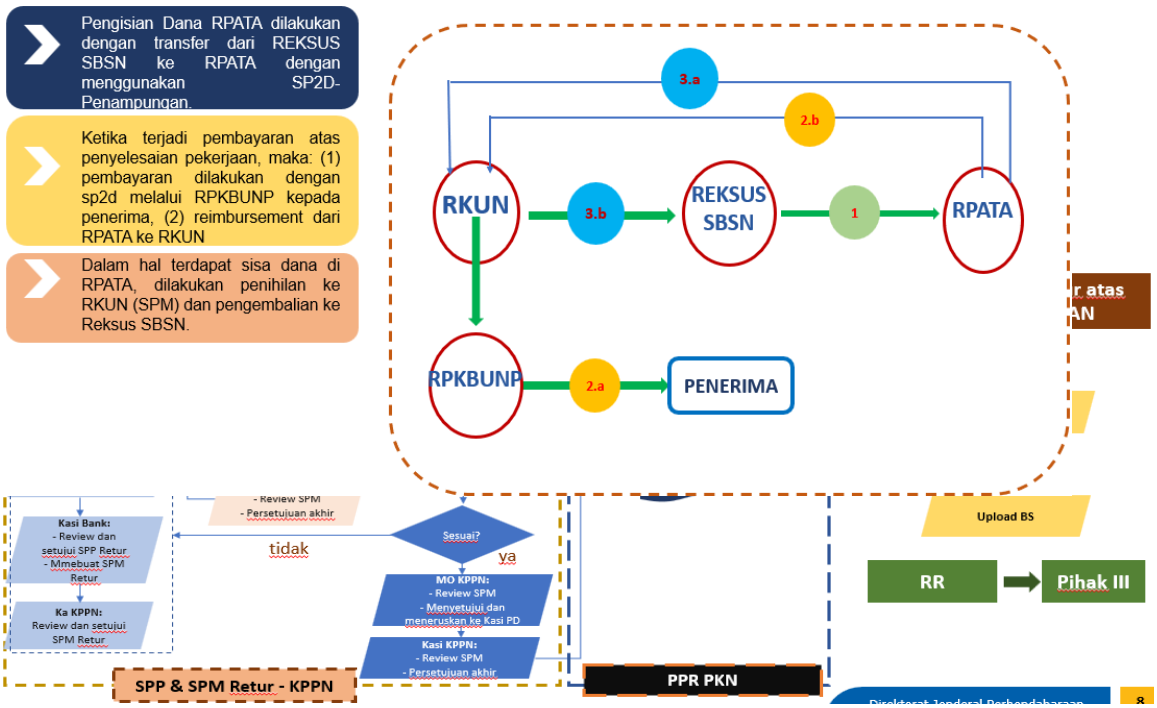

g. Proses bisnis penyelesaian retur SP2D RPATA

Berdasarkan proses bisnis diatas, pada bulan Desember 2023 telah dilakukan penampungan, pembayaran dan penihilan RPATA baik yang bersumber dari dana RM, PHLN maupun SBSN dengan total saldo RPATA per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.197.163.429.594.

Dalam saldo tersebut, terdapat penyesuaian saldo RPATA sebesar Rp69.642.541.396 disebabkan transaksi penihilan dan pembayaran SP2D dari RPATA ke RKUN sehingga dana di RPATA setelah penyesuaian sebesar Rp21.127.520.888.198.

D.3.1.3. Rekening SAL dalam Valuta USD

Berdasarkan data saldo Dana SAL BUN periode akhir tahun 2017 s.d. 2022, diketahui bahwa proporsi Dana SAL BUN dalam mata uang USD cenderung meningkat secara signifikan, dibandingkan dengan proporsi Dana SAL BUN dalam mata uang Rupiah.

Disisi lain, data historis pengeluaran negara pada periode Triwulan I dalam empat tahun terakhir dalam mata uang USD, menunjukan kebutuhan mata uang USD cukup tinggi, dengan rata-rata pengeluaran sebesar USD2,7 miliar.

Untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara dalam mata uang USD tersebut, tidak cukup dipenuhi dari penerimaan negara dalam mata uang USD yang diterima melalui Modul Penerimaan Negara (MPN). Selanjutnya, Direktorat PKN akan melakukan penukaran mata uang Rupiah ke dalam mata uang valuta asing (USD) melalui Bank Indonesia. Hal ini menyebabkan timbulnya risiko nilai tukar yang besar (selisih kurs *realized*).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk mempertahankan Dana SAL BUN dalam bentuk mata uang USD melalui pembukaan Rekening SAL dalam mata uang USD (Rek SAL BUN USD), sehingga seluruh saldo penerimaan dalam mata uang USD, tetap dapat dipertahankan dan dapat digunakan untuk kebutuhan di awal tahun berikutnya, tanpa pemerintah perlu melakukan penukaran valuta asing.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, telah ditetapkan dasar hukum pembukaan rekening melalui Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2023 tentang Perubahan Kedua atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-10/PB/2022 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemindahbukuan Dana SAL BUN Serta Formula Perhitungan Jumlah Dana SAL BUN Efisien, pada tanggal 6 Desember 2023.

Penyimpanan Dana SAL BUN dalam valuta asing Pengelolaan rekening SAL valas secara akuntansi tetap menimbulkan selisih kurs unrealized yang pencatatannya diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan nomor Per-19/PB/2016 dengan formula perhitungan selisih kurs *unrealized* sebagai berikut:

$$Unrealized\ Gain/Loss = \text{Saldo Akhir} - \{\text{Saldo Awal} + (\text{Mutasi Penerimaan} - \text{Mutasi Pengeluaran})\}$$

Jika hasilnya positif maka merupakan Selisih Kurs **Unrealized Gain**,
jika hasilnya negatif merupakan Selisih Kurs **Unrealized Loss**.

- Saldo Awal = Saldo Valas Pada Awal Periode x Kurs Tengah BI
- Mutasi Penerimaan = Jumlah {Transaksi Penerimaan x Kurs Transaksi)
- Mutasi Pengeluaran = Jumlah {Transaksi Pengeluaran x Kurs Transaksi)
- Saldo Akhir = Saldo Valas Pada Akhir Periode x Kurs Tengah BI

Dengan catatan:

- Saldo Awal merupakan saldo awal Dana SAL BUN pada RKUN USD dan Rekening Penempatan USD sebelum Pemenuhan Dana SAL BUN ke Rek SAL USD berdasarkan LKPP 2022 *Audited* yaitu sebesar USD8.415.517.653
- kurs tengah BI pada posisi saldo awal tanggal 2 Januari 2023 yaitu Rp15.592
- Mutasi Penerimaan merupakan transaksi masuk ke Rek SAL USD dalam rangka pemenuhan Dana SAL BUN berdasarkan LKPP 2022 *Audited* yaitu sebesar USD8.415.517.653

- Mutasi Pengeluaran merupakan transaksi keluar dari RKUN USD dalam rangka pemenuhan Dana SAL BUN berdasarkan LKPP 2022 *Audited* yaitu sebesar USD8.415.517.653
- Kurs transaksi saat transaksi pemenuhan Dana SAL BUN berdasarkan LKPP 2022 *Audited* yaitu Rp15.516
- kurs tengah BI pada posisi saldo akhir tanggal 31 Desember 2023 yaitu Rp15.439

Berdasarkan formula dimaksud, perhitungan selisih kurs *unrealized* disajikan sebagai berikut:

$$unrealized\ gain\ (loss) = (8.415.517.653 \times 15.439) - \{(8.415.517.653 \times 15.592) + ((8.415.517.653 \times 15.516) - (8.415.517.653 \times 15.516))\}$$ = **(1.287.574.200.909)**

sehingga selisih kurs *unrealized* dalam rangka pengelolaan Dana SAL BUN pada Rekening SAL USD per tanggal 31 Desember 2023 mengalami loss (selisih kurs *unrealized loss*).

D.3.1.4. Penempatan Uang Negara pada BUMPUN yang melewati Akhir Tahun 2023

Dalam rangka pengelolaan kelebihan kas, Pemerintah menempatkan uang pada bank umum. Penempatan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 03/PMK.05/2010, Peraturan Menteri Keuangan nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umumm sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 53/PMK.05/2017, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-19/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penempatan Uang Negara pada Bank Umum.

Penempatan uang negara pada Bank Umum Mitra Penempatan Uang Negara (BUMPUN) adalah salah satu instrumen optimalisasi kas negara yang dikelola oleh unit Treasury Dealing Room Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk mendapatkan remunerasi dari hasil penempatan uang negara pada mitra penempatan uang negara (counterpart). Pada akhir tahun 2023, dilakukan penempatan uang negara pada BUMPUN dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perspekstif Pengelolaan Kas Negara.
   a. Berdasarkan perhitungan perencanaan kas, pada akhir tahun 2023 terdapat saldo kas (SiLPA) yang masih mencukupi untuk dilakukan optimalisasi kas untuk mengurangi kas yang *idle* di akhir tahun.
   b. Penempatan dana di akhir tahun akan memberikan remunerasi yang optimal yang selaras dengan dorongan dari BPK untuk mengelola kas secara efisien.
2. Perspekstif Akuntansi dan Pelaporan.
   a. Penempatan dana yang akan melewati akhir tahun dapat dilakukan baik dalam bentuk deposito maupun dalam bentuk reverse repo dengan catatan bersifat sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas kapan saja, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan dan mempunyai masa jatuh tempo yang pendek kurang dari tiga bulan sejak tanggal perolehannya.
   b. adanya pengungkapan yang *adequate* pada laporan keuangan.
3. Dampak bagi Perbankan dan Moneter.
   a. Penempatan dana melewati akhir tahun akan memberikan dampak positif dengan memberikan kepastian dukungan Pemerintah terhadap kebutuhan likuiditas perbankan yang meningkat di akhir tahun.

b. Penempatan dana Pemerintah ke perbankan akan membantu Operasi Moneter Bank Indonesia dalam memberikan *supply* likuditas ke perbankan di akhir tahun.

Detail penempatan *outstanding* per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Uraian Instrumen	Nama *counter party*	Suku Bunga	Nilai *Outsanding*	Pendapatan
Transaksi Penempatan Uang tanggal 27 Desember 2023 dengan tenor 14 hari	Bank BRI	7,90%	2.000.000.000.000	6.060.273.973
Transaksi Penempatan Uang tanggal 28 Desember 2023 dengan tenor 14 hari	Bank BTN	7,91%	1.500.000.000.000	4.550.958.904
Transaksi Penempatan Uang tanggal 28 Desember 2023 dengan tenor 14 hari	Bank BRI	7,85%	1.500.000.000.000	4.516.438.356
Jumlah			**5.000.000.000.000**	**15.127.671.233**

D.3.1.5. Penggunaan Dana SAL BUN dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Kas Temporer yang Melewati Akhir Tahun Anggaran

Sebelum tutup kas akhir tahun 2023, Pemerintah melakukan perhitungan kebutuhan anggaran. Berdasarkan perhitungan tersebut dibutuhkan peminjaman SAL sebesar Rp 90 triliun untuk pemenuhan kebutuhan kas temporer akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024. Peminjaman SAL sebesar Rp 90 triliun dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

a. Penggunaan SAL untuk pemenuhan kebutuhan kas temporer ini merupakan bagian dari strategi pengelolaan kas sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) PMK Nomor 147/PMK.05/2021 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih, dimana SAL dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kas temporer, selain digunakan untuk pemenuhan pembiayaan anggaran dan/atau stabilisasi.
b. Untuk pemenuhan kebutuhan kas temporer di akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024, pemerintah melakukan peminjaman SAL sebesar Rp90 triliun.
c. Peminjaman SAL tersebut dilakukan melalui pemindahbukuan kas dari Rekening Lain BI SAL ke RKUN sebesar Rp90 triliun pada bulan Desember 2023.
d. Peminjaman SALRp90 triliun melalui pemindahan uang dari rekening SAL ke RKUN tidak berdampak pada remunerasi karena kedua rekening ini berada di Bank Indonesia dan mendapatkan rate remunerasi yang sama, yaitu 80,476% x BI–7DRR
e. Atas peminjaman SAL tersebut, telah dilakukan pengembalian dari RKUN ke Rekening Lain BI SAL pada tanggal 2 Februari 2024. Hal ini sesuai Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.05/2021 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih, dimana SAL yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kas temporer harus dikembalikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
f. Peminjaman kas dari Rekening Lain BI SAL yang dilakukan pada tahun anggaran berikutnya turut diperhitungkan dalam memperhitungkan saldo SAL BUN yang akan dipindahbukukan ke Rekening Lain BI SAL.

D.3.2. BA 999.01

1. Utang pemerintah Indonesia dapat diklasifikasi berdasarkan utang luar negeri dan utang dalam negeri sebagaimana definisi dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI). Utang luar negeri pemerintah adalah termasuk nilai Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar negeri dan

dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk, sedangkan Utang Dalam Negeri adalah utang pemerintah yang dimiliki oleh penduduk. Rincian dengan klasifikasi tersebut sebagai berikut:

No	Jenis Utang	Denominasi Mata Uang		Jumlah
		Valas (Rp)	Rupiah (Rp)	(Rp)
1	Utang Luar Negeri			
a	SBN yang dimiliki bukan penduduk	1.261.651	832.278	2.093.929
b	Pinjaman Luar Negeri	973.428		973.428
	Jumlah Utang Luar Negeri	2.235.079	832.278	3.067.357
2	Utang Dalam Negeri			-
a	SBN yang dimiliki oleh penduduk	110.390	4.936.785	5.047.175
b	Pinjamin Dalam Negeri		36.235	36.235
	Jumlah Utang Dalam Negeri	110.390	4.973.020	5.083.950
	Jumlah Utang Luar Negeri dan Utang Dalam Negeri Pemerintah	**2.345.469**	**5.805.298**	**8.151.307**

*) Data tabel (dalam milyar) di atas adalah nilai pokok atas utang (tidak memperhitungkan *unamortized* diskon dan *unamortized premium*)

Sebagaimana tabel di atas yang dimaksud dengan penduduk adalah suatu unit ekonomi baik Orang atau Badan yang berdomisili atau berencana berdomisili di suatu negara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, yang pusat kegiatan ekonomi utamanya berada pada negara domisili tersebut. Yang tidak masuk kriteria tersebut dikategorikan bukan penduduk *(Part IV Balance of Payments Manual* (BOPM) IMF, Edisi 4, *Public Sector Debt Statistic: Guide for Compilers and Users* Tahun 2013 dan *External Debt Statistics: Guide for Compiler and User* Tahun 2014).

Seluruh SBN yang diterbitkan di pasar domestik dan pasar internasional diklasifikasikan sebagai Utang Dalam Negeri sesuai dengan Bultek SAP Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrual.

2. Penyajian *discount* dan *premium* pada Neraca pada Tahun 2023 disajikan secara rinci sebagaimana dimuat pada Lampiran LD30a, LD30b, LD30c, LD30d dan LD30e. Adapun penggunaan koefisien dalam perhitungan *Discount* dan *Premium* yang belum diamortisasi (*Unamortized Discount* dan *Unamortized Premium*) atas seri-seri SBN yang diterbitkan sebelum tahun 2007, perhitungan nilainya yang disajikan dalam Laporan Keuangan Tahun 2007 *(Audited)* menjadi saldo awal *Discount* dan *Premium* yang belum diamortisasi untuk tahun-tahun selanjutnya. Seri SBN yang diterbitkan mulai 2007, nilai *unamortized discount/premium* disajikan pada neraca dengan memperhitungkan amortisasinya menggunakan metode garis lurus dan koefisiennya sebesar nilai *unamortized discount/premium* saat penerbitan yang diperhitungkan selama umur utang tersebut sampai dengan tanggal pelunasannya.

3. BMN yang digunakan sebagai *underlying asset* SBSN pada penerbitan SBSN sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 adalah sejumlah 519 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) dengan nilai sebesar Rp194.023.043.399.655,00. Seluruh BMN yang digunakan sebagai *underlying asset* SBSN sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 merupakan BMN yang telah menggunakan nilai revaluasi.

4. *Outstanding* SBSN per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.410.979.735.000.000,00 (menggunakan kurs saat penerbitan) atau sebesar Rp1.432.897.063.000,00 (menggunakan kurs pelaporan). Adapun *Outstanding* aset per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.436.402.805.731.170,00 yang terdiri dari:
   a. BMN sebesar Rp809.972.587.235.724,00;
   b. Proyek sebesar Rp618.575.218.495.445,00; dan
   c. Jasa sebesar Rp7.855.000.000.000,00.
5. Dalam rangka memenuhi ketentuan PMK Nomor 99/PMK.08/2021 Tentang Perubahan atas PMK 205/PMK.08/2017 Tentang Penggunaan BMN Sebagai Dasar penerbitan SBSN dan PMK Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan SBSN, pada tahun 2023 telah dilakukan penggantian BMN yang menjadi *underlying asset* baik berupa BMN dan proyek.

D.3.3. BA 999.02

Penyusunan Laporan Keuangan UAP BUN BA 999.02 Tahun 2023 (*Audited*) mencakup pendapatan hibah terencana maupun langsung yang telah dilakukan pengesahan sesuai amanat PMK Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah serta PMK Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, serta PMK Nomor 195/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 39 PMK No.99/PMK.05/2017 bahwa PA/KPA yang menerima Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga membuat dan menandatangani BAST bersama dengan Pemberi Hibah. Berdasarkan pasal tersebut, sepanjang belum terdapat BAST antara pemberi dan penerima hibah, baik KL maupun Kementerian Keuangan belum dapat mengakui hal tersebut sebagai pendapatan hibah tahun berjalan. Hal tersebut karena belum terdapat perpindahan kepemilikan serta peralihan hak dan kewajiban dari donor kepada penerima hibah.

PMK 195/PMK.05.2019 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, menyatakan bahwa “Dalam hal Pemberi PHLN tidak menyampaikan NoD dalam batas waktu yang wajar, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen dapat menggunakan rekening koran yang menunjukkan nomor rekening, nama rekening, dan nilai transfer sesuai dengan Surat Penarikan Dana (withdrawal application) untuk digunakan sebagai dasar penerbitan surat perintah pembukuan Penarikan PHLN”.

Transaksi pendapatan hibah dapat mempengaruhi pos neraca untuk transaksi yang masih dalam proses dan belum dilakukan pengesahan atau reklasifikasi akun.

D.3.4. BA 999.03

D.3.4.1. Kondisi Status ILKPN

a. Realisasi Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Negara

Laporan Keuangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai UAKPA BUN BA 999.03 Investasi Pemerintah pada PMN Tahun 2023 *Audited* telah disusun berdasarkan ILKPN yang disampaikan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Adapun rekapitulasi status laporan keuangan perusahaan negara dirinci pada tabel berikut:

	Status Terakhir	Jumlah Perusahaan
BUMN	*Audited* 2023	41
	Draft Audited 2023	4
	Unaudited 2023	17
	SMT I / 2023	1
	TW III / 2022	2
	TW I / 2022	2
	Unaudited 2021	1
	Audited 2020	1
	TW III / 2018	1
		70
PPKNM	*Audited* 2023	32
	Unaudited 2023	9
	TW III / 2023	5
	SMT I / 2023	1
	Audited 2022	1
	Audited 2020	1
		49

b. BUMN Yang Belum Menyelesaikan Laporan Keuangan Audited

Sampai dengan tanggal 18 Mei 2024, masih terdapat BUMN dengan nilai investasi di atas Rp1 Triliun yang belum menerbitkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 (Audited) dengan penjelasan sebagai berikut.

No.	BUMN	Alasan Keterlambatan
1	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Karena integrasi grup BUMN menjadi 3 subholding maka *Audit report* ditargetkan selesai pada Mei 2024, namun laporan keuangan audited masih belum selesai sampai pertengahan Mei.
2	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Karena terdapat isu terkait tagihan *Track Access Charges* (TAC) sebagai dampak penerapan aturan baru pada Kementerian Perhubungan. Sebelumnya sudah dilakukan permohonan penihilan tagihan namun ditolak Kementerian Perhubungan. Saat ini sedang diajukan pengurangan nilai tagihan dan masih dilakukan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan. Finalisasi audit menunggu jawaban Kementerian Perhubungan maka *audit report* ditargetkan selesai pada bulan Mei 2024, namun sampai dengan pertengahan Mei laporan keuangan audited belum selesai.
3	PT Danareksa (Persero)	Karena masih menunggu selesainya audit pada PT PPA maka *audit report* ditargetkan selesai pada akhir Mei 2024.
4	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Karena terdapat isu *going concern,* maka KAP menunggu dokumen Rencana Penyehatan Keuangan (RPK), sehingga *audit report* ditargetkan selesai pada akhir April 2024, namun sampai dengan pertengahan Mei masih belum selesai.
5	PT Bio Farma (Persero)	Karena menunggu penyelesaian audit pada seluruh anak Perusahaan PT Bio Farma yang mengalami masalah *going concern,* maka *audit report* ditargetkan selesai pada akhir Mei 2024.

Beberapa BUMN yang dititipkelolakan pada PT Danareksa (Persero) dan PT PPA terlambat menyampaikan laporan audit Tahun Buku 2023 akibat kondisi perusahaan mengalami restrukturisasi keuangan dan kesulitan dalam pembayaran KAP sehingga laporan audit Tahun Buku 2022 baru saja terbit di akhir Desember 2023 dan ada yang belum terbit sampai dengan Triwulan I 2024. Hal ini menyebabkan keterlambatan proses audit Tahun Buku 2023. BUMN tersebut antara lain:

No.	BUMN	Audit Terakhir
1	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Terakhir audit TB 2019
2	PT Barata Indonesia (Persero)	Terakhir audit TB 2020
3	PT Djakarta Lloyd (Persero)	Terakhir audit TB 2020
4	PT Indah Karya (Persero)	Terakhir audit TB 2020
5	PT Amarta Karya (Persero)	Terakhir audit TB 2021
6	PT Boma Bisma Indra (Persero)	Terakhir audit TB 2021
7	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Terakhir audit TB 2021
8	PT Primissima (Persero)	Terakhir audit TB 2021
9	PT Semen Kupang (Persero)	Terakhir audit TB 2021
10	PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero)	Terakhir audit TB 2021
11	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Terakhir audit TB 2022
12	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	Terakhir audit TB 2022
13	PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)	Terakhir audit TB 2022
14	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	Terakhir audit TB 2022

D.3.4.2. Perkembangan BUMN/Perusahaan Negara yang mengalami Defisit Ekuitas

Jumlah BUMN/Perusahaan Negara yang mengalami defisit ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	Perusahaan	Ekuitas Atribusi Entitas Pengendali (Rp Juta)	
		31-Dec-22	31-Dec-23
1	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	(1.238.462)	(1.238.462)
2	PT Kertas Leces (Persero)	(722.649)	(722.649)
3	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	(1.920.826)	(1.920.826)
4	PT Iglas (Persero)	(1.378.913)	(1.378.913)
5	PT PANN (Persero)	(5.807.943)	(5.807.943)
6	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	(1.577.292)	(1.650.787)
7	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	(405.974)	(807.577)
8	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	(3.117.534)	(270.343)
9	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	(620.610)	(708.594)
10	PT ASABRI (Persero)	(1.579.441)	(1.069.317)
11	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	(23.357.142)	(19.258.289)
12	PT Barata Indonesia (Persero)	(1.124.318)	(1.631.066)
13	PT Semen Kupang (Persero)	(126.659)	(516.171)
14	PT Indah Karya (Persero)	(4.200)	(4.200)
15	PT Produksi Film Negara (Persero)	2.260	(416)
16	PT Primissima (Persero)	3.158	(17.776)
17	PT Bina Karya (Persero)	5.255	(5.853)

D.3.4.3. Pelaksanaan Penyertaan Modal Negara melalu mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah Pusat Tahun 2023

UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun Anggaran 2023 mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan penambahan PMN melalui mekanisme pemindahtanganan BMN (PMPP) kepada PT ASDP Indonesia Ferry, Perum DAMRI, Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, PT Brantas Abipraya, dan PT Sejahtera Eka Graha. Pada tahun 2023 telah diterbitkan PP PMN melalui mekanisme pemindahtanganan BMN kepada PT ASDP Indonesia Ferry, Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, dan PT Brantas Abipraya, adapun untuk Perum DAMRI dan PT Sejahtera Eka Graha belum diterbitkan PP PMPP nya.

D.3.4.4. Estimasi Dari Dampak Finansial yang Diukur Kewajiban Penjaminan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, diatur bahwa Anggaran kewajiban penjaminan merupakan bagian dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) BA BUN 999.03.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 220/KMK.08/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 j.o. PMK nomor 28/PMK.08/2022 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan yang ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program PEN sebagaimana diubah menjadi PMK 32/PMK.08/2021, Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah untuk program penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional (pasal 36 ayat (1) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2020 tentang APBN Tahun Anggaran 2021), anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah untuk program PEN (dukungan loss limitpelaku UMKM dan dukungan back stop loss limitpelaku Korporasi),dan pengelolaan dana cadangan kewajiban penjaminan dalam rangka pelaksanaan anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah. Kemudian Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara juga ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk program penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada Badan Usaha Milik Negara berdasarkan PMK nomor 125/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

Kewajiban penjaminan adalah:

a. kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau
b. kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
    1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau

2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Amanat pengaturan pemberian jaminan

Sesuai Perpres Nomor 91/2007, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT. PLN (Persero) kepada kreditor perbankan yang menyediakan pendanaan kredit perbankan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara.

Kemudian melalui Perpres Nomor 46/2019, Pemerintah memberikan jaminan sebesar 70% atas pembayaran kembali pokok kredit investasi PDAM kepada kreditor perbankan yang menyediakan pendanaan kredit perbankan dalam rangka percepatan penyediaan air minum, sedangkan 30% sisanya menjadi risiko bank pemberi kredit. Dari 70% jaminan Pemerintah tersebut menjadi beban utang PDAM apabila Pemerintah Pusat telah membayar klaim penjaminan ke Bank Pemberi Kredit, sedangkan Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada PDAM untuk menyelesaikan utang kepada Pemerintah, namun apabila Pemerintah Daerah tidak memberikan dukungan dan gagal memampukan PDAM, maka kewajiban pembayaran penyelesaian utang PDAM beralih kepada Pemerintah Daerah.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 78/2010 dan Nomor 38/2015 pasal 17 juga memberikan jaminan terhadap proyek kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI), dan sebagaimana Perpres Nomor 78/2010 pasal 4: penjaminan infrastruktur diberikan atas risiko infrastruktur yang (a) lebih mampu dikendalikan, dikelola atau dicegah terjadinya, atau diserap oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) daripada Badan Usaha, (b) bersumber (risk factor) dari Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama, dan/atau (c) bersumber (risk factor) dari Pemerintah selain Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama.

Kemudian melalui Perpres Nomor 100/2014 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 117/2015, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman dan obligasi PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka pembangunan jalan tol di Sumatera.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 82/2015 memberikan jaminan penuh terhadap kewajiban pembayaran pinjaman PT. PLN (Persero) kepada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) yang menyediakan pendanaan kredit jangka panjang setara pinjaman Pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur.

Kemudian melalui Perpres Nomor 49/2017, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman dan obligasi PT. Kereta Api (Persero) dalam rangka mendukung proyek penyelengaraan Light Rail Transit/LRT Jabodebek.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 14/2017 memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman dan obligasi PT. PLN (Persero) dalam rangka mendukung percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan (35GW).

Kemudian melalui Perpres Nomor 58/2017 sebagaimana terakhir diubah dengan Perpres 109/2020, Pemerintah memberikan jaminan atas risiko politik bagi Kementerian/Lembaga/Pemda/BUMN/BUMD dalam Perjanjian Kerjasama/dokumen yang dipersamakan dengan Badan Usaha dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional.

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat dari dampak pandemi Covid-19, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 (diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020), Pemerintah dapat memberikan penjaminan secara langsung dan/atau melalui badan usaha yang ditunjuk. Penjaminan secara langsung oleh Pemerintah hanya dapat diberikan kepada BUMN, sedangkan penjaminan melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk penjaminan atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan. Adapun tujuan pemberian penjaminan pemerintah tersebut untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

Dalam rangka pelaksanaan penjaminan pemerintah melalui badan usaha penjaminan di Tahun 2020 kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pemerintah telah menugaskan/menunjuk PT Jaminan Kredit Indonesia/Jamkrindo (Persero) dan PT Asuransi Kredit Indonesia/Askrindo (Persero) untuk melaksanakan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan. Pada skema penjaminan tersebut, Pemerintah memberikan dukungan berupa pembayaran subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan dukungan loss limit kepada PT Jamkrindo (Persero) dan PT Askrindo (Persero). Selain melakukan penjaminan kepada pelaku UMKM, pemerintah juga memberikan penjaminan kredit modal usaha bagi pelaku usaha korporasi. Pada skema penjaminan ini, Pemerintah menugaskan/menunjuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk pelaksanaan penjaminan kredit modal kerja bagi pelaku usaha korporasi. Untuk menjaga kapasitas LPEI dalam melaksanakan penugasan, Pemerintah memberikan dukungan loss limit yang ditujukan untuk membatasi risiko LPEI dalam melaksanakan penugasan. Dalam rangka pemberian dukungan loss limit tersebut, Pemerintah melalui Menteri Keuangan menugaskan PT Penjaminan infrastruktur Indonesia (PII). PT PII sebagai pelaksana dukungan loss limit juga menerima dukungan Pemerintah berupa backstop Loss Limit sebagai antisipasi adanya risiko kelebihan klaim atas dukungan loss limit yang ditanggung oleh PT PII. Selain itu, bagi BUMN yang melakukan penugasan dari Pemerintahdan terdampak pandemic Covid-19, Pemerintah bersama PT PII juga memberikan penjaminan bersama untuk pinjaman kredit dari BUMN dimaksud.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 125/2022 dapat memberikan jaminan kredit dan/atau subsidi bunga kepada Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dalam rangka pelaksanaan pinjaman untuk keperluan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Karakteristik Kewajiban Penjaminan Pemerintah

Kewajiban Pemerintah untuk membayar kepada kreditur atau badan usaha baru akan timbul jika pihak yang dijamin (BUMN, BUMD, PJPK/Badan Usaha) tidak mampu memenuhi kewajibannya (mengalami default). Akibatnya, kewajiban ini memiliki unsur ketidakpastian mengenai timbul/tidak timbulnya di masa depan, termasuk mengenai jumlahnya yang tidak dapat diukur secara pasti.

Latar belakang timbulnya penjaminan antara lain sebagai berikut:

a. Perlu pembangunan infrastruktur sebagai penggerak perekonomian v.s. keterbatasan dana Pemerintah; dan
b. Perlu dukungan fiskal dalam menarik peran swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui kerjasama yang saling menguntungkan serta pembagian risiko yang wajar antara Pemerintah dan swasta.

Sebagai konsekuensi atas dukungan percepatan pembangunan proyek infrastruktur nasional, mekanisme penjaminan oleh Pemerintah diberikan dalam dua bentuk, yaitu penjaminan kredit (perbankan dan obligasi) dan penjaminan investasi.

Penjaminan kredit diberikan untuk mendukung pelaksanaan proyek 10.000 MW tahap I, proyek percepatan penyediaan air minum, proyek jalan tol di Sumatera, proyek infrastruktur dengan skema pinjaman langsung, proyek LRT Jabodebek, dan proyek infrastruktur ketenagalistrikan, yaitu Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran kredit perbankan dan/atau obligasi atas keenam program penjaminan dimaksud yang tidak dapat dibayarkan oleh pihak terjamin. Sementara itu, penjaminan investasi diberikan bersama Pemerintah dan/atau PT PII (Persero) dalam menjamin kewajiban keuangan pada proyek KPBU dan penjaminan risiko politik oleh Pemerintah pada proyek strategis nasional.

Estimasi dari Dampak Finansial yang Diukur

Estimasi besaran alokasi anggaran kewajiban penjaminan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar sebesar Rp330,5 miliar yaitu Rp296,15 miliar untuk program percepatan pembangunan infrastruktur nasional dan Rp34,35 miliar untuk program penugasan pembiayaan infrastruktur daerah. Adapun alokasi anggaran kewajiban penjaminan dalam APBN TA 2023 tersebut sebagai konsekuensi dan komitmen dalam penerbitan jaminan pemerintah dan untuk mendukung mitigasi risiko default dari program penjaminan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara (10.000 MW tahap I), penjaminan infrastruktur pada proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), penjaminan pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN, penjaminan pemerintah untuk percepatan proyek pembangunan jalan tol di Sumatera dan penjaminan pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur. Berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 diatur bahwa anggaran kewajiban penjaminan pada APBN diakumulasikan ke rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah yang digunakan untuk pembayaran klaim pada tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya.

Sampai dengan akhir Desember Tahun 2023 jumlah akumulasi pemberian penjaminan terhadap penugasan proyek-proyek infrastruktur dari awal penerbitan jaminan tahun 2008 adalah 98 surat jaminan pemerintah dengan nilai sebesar ekuivalen Rp644,58 triliun (Rp210,55 triliun, USD27,00 miliar, dan EUR1,04 milar). Per akhir Desember 2023, 51 penjaminan masih berstatus aktif dengan nilai sebesar ekuivalen Rp474,12 triliun (Rp154,64 triliun, USD19,57 miliar, dan EUR1,04 miliar) dengan nilai outstanding/eksposur investasi sebesar Rp339,26 triliun (Rp84,3 triliun, USD15,84 miliar, dan dan EUR0,62 miliar).

Rincian portofolio kewajiban penjaminan yang masih aktif per program penjaminan sampai dengan akhir Desember 2023 (*outstanding* per September tahun 2023) disajikan dalam tabel berikut:

No.	Rincian Program Penjaminan Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Pihak Terjamin	Penerima Jaminan	Jumlah Dokumen Penjaminan	Rentang Tenor Penjaminan (Tahun)*			Nilai Penjaminan Kredit / Investasi (miliar)		Posisi Outstanding Kredit / Exposure Investasi (miliar)	
								Original Curr.	Eq. IDR	Original Curr.	Eq. IDR
1	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I)	PT PLN (Persero)	Perbankan	3	10	s.d.	13	IDR 4.674,96 USD 0,63	IDR 14.313,92	IDR 1.423,20 USD 0,09	IDR 2.739,73
2	Percepatan Penyediaan Air Minum**	PDAM	Perbankan	7	9	s.d.	10	IDR 383,72	IDR 383,72	IDR 58,21	IDR 58,21
3	Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN	BUMN	Lembaga Keuangan Internasional	11	15	s.d.	35	USD 3,58 EUR 1,04	IDR 73.082,14	USD 2,11 EUR 0,62	IDR 43.200,91
4	Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	PT HK (Persero)	Lembaga Keuangan dan Wali Amanat	8	5	s.d.	25	IDR 38.870,34 USD 0,60	IDR 48.119,94	IDR 18.035,04 USD 0,60	IDR 27.284,64
5	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas (Proyek 10.000 MW Tahap 2)	PT PLN (Persero)	Pengembang Listrik Swasta	7	15	s.d.	20	USD 3,91	IDR 60.347,79	USD 4,00	IDR 61.627,33
6	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Proyek Infrastruktur dengan skema KPBU)	PJPK	Badan Usaha	7	15	s.d.	21	IDR 68.536,14 USD 4,24	IDR 133.960,10	IDR 39.028,07 USD 4,00	IDR 100.746,69
7	Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN	Pemda	PT SMI (Persero)	1	5	s.d.	9	IDR 3.901,47	IDR 3.901,47	IDR 1.901,16	IDR 1.901,16
8	Penyelengaraan Light Rail Transit/LRT Jabodebek	PT KAI (Persero)	Perbankan	2	15	s.d.	18	IDR 23.419,13	IDR 23.419,13	IDR 16.706,51	IDR 16.706,51
9	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	PT PLN (Persero)	Perbankan	4	10	s.d.	10	IDR 15.173,79	IDR 116.919,39	IDR 7.237,87	IDR 84.999,64
			Pengembang Listrik Swasta	2	19	s.d.	19	USD 6,60		USD 5,04	
Total				52				IDR 154.959,55 USD 19,57 EUR 1,04	IDR 474.447,60	IDR 84.390,06 USD 15,84 EUR 0,62	IDR 339.264,83
Nilai tukar menggunakan kurs tengah BI akhir Desember 2023			USD EUR	15.416,00 17.139,52							

*) Rentang tenor penjaminan Proyek 10.000MW Tahap 2, KPBU dan PIK (nomor 5, 6 dan 9 (Penerima Jaminan Pengembang listrik Swasta)) sejak Tanggal Operasi Komersial

**) Nilai penjaminan hanya sebesar 70% nilai perjanjian kredit

Selanjutnya, mulai tahun 2023 terdapat pemberian penjaminan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Sampai dengan akhir Desember 2023 jumlah pemberian penjaminan adalah 1 surat jaminan pemerintah dengan nilai sebesar Rp1,5 triliun namun belum terdapat outstanding/eksposur investasi. Rincian portofolio disajikan dalam tabel berikut:

No	Rincian Program Penjaminan Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Pihak Terjamin	Penerima Jaminan	Jumlah Dokumen Penjaminan	Rentang Tenor Penjamin (Tahun)*	Nilai Penjaminan Kredit/ Investasi (miliar)		Posisi Outstanding Kredit/ Expossure Investasi (miliar)	
						Original Curr.	Eq.IDR	Original Curr.	Eq.IDR
1	Cadangan pangan Pemerintah	PT RNI	Perbankan	1	*sd*	IDR 1.500,00	IDR 1.500,00	IDR 0,00	IDR 0,00

*) Tenor Pinjaman: 6 bulan sejak tanggal penandatanganan kredit atau maksimal sampai dengan berakhirnya program CPP sesuai keputusan Pemerintah

Kemungkinan Penggantian Oleh Pihak Ketiga

Anggaran kewajiban penjaminan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah selaku pihak penjamin kepada kreditur/ badan usaha akan diperhitungkan sebagai berikut:

a. Sesuai dengan PMK Nomor 44/PMK.01/2008 Tentang Persyaratan Dan Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara, apabila PT. PLN (Persero) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur, Pemerintah sebagai penjamin akan membayar kewajiban kepada kreditur PT. PLN (Persero) sejumlah utang yang jatuh tempo. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PT PLN (Persero).

b. Berdasarkan PMK Nomor 60/PMK.08/2020 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, Pemerintah Pusat menanggung sebesar 70% dari pokok kredit investasi PDAM yang jatuh tempo dalam hal PDAM tidak mampu memenuhi kewajibannya (default). Dari 70% jaminan tersebut selanjutnya menjadi utang PDAM kepada Pemerintah Pusat apabila Pemerintah Pusat telah

membayar klaim penjaminan ke Bank Pemberi Kredit, sedangkan Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada PDAM untuk menyelesaikan utang kepada Pemerintah, namun apabila Pemerintah Daerah tidak memberikan dukungan dan gagal memampukan PDAM, maka kewajiban pembayaran penyelesaian utang PDAM beralih kepada Pemerintah Daerah. Atas beban utang dimaksud, Pemerintah Daerah dapat: (i) membayar secara langsung melalui mekanisme penganggaran APBD tahun berjalan dan/atau (ii) mengkonversi beban menjadi pinjaman Pemerintah Daerah melalui perjanjian pinjaman antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Keuangan, dimana dalam hal terdapat tunggakan kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat berdasarkan perjanjian pinjaman, Pemerintah Daerah dapat dikenakan sanksi berupa pemotongan atas penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH).

c. Berdasarkan PMK Nomor 8/PMK.08/2016 Tentang Perubahan PMK Nomor 260/PMK.011/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha, Pemerintah memberikan jaminan atas kewajiban finansial PJPK. Kewajiban finansial PJPK adalah kewajiban untuk membayar kompensasi finansial kepada badan usaha atas terjadinya risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pihak PJPK sesuai dengan Alokasi Risiko sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerjasama. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PJPK kecuali jika Kementerian/Lembaga sebagai PJPK (PMK nomor 260/PMK.011/2010 pasal 25). Penjaminan untuk proyek ini dilakukan bersama antara Pemerintah dengan PT PII secara *risk sharing* (PMK nomor 260/PMK.011/2010 pasal 3, atau *amount sharing* (PMK nomor 260/PMK.011/2010 pasal 37 ayat (4).

d. Berdasarkan PMK Nomor 142/PMK.08/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, apabila PT Hutama Karya (Persero) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur/pemegang obligasi, Pemerintah sebagai penjamin akan membayar kewajiban kepada kreditur/pemegang obligasi PT Hutama Karya (Persero) sejumlah utang yang jatuh tempo. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PT Hutama Karya (Persero).

e. Berdasarkan PMK Nomor 189/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara, anggaran kewajiban penjaminan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah selaku pihak penjamin kepada pihak terjamin akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara.

f. Berdasarkan PMK Nomor 135/PMK.08/2019 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 130/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, setiap pelaksanaan atas pembayaran Jaminan Pinjaman atau Jaminan Obligasi menimbulkan akibat berupa timbulnya utang dari Terjamin kepada Penjamin.

g. Berdasarkan PMK Nomor 148/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi, setiap pelaksanaan atas

pembayaran Jaminan Pinjaman atau Jaminan Obligasi menimbulkan akibat berupa timbulnya utang dari Terjamin kepada Penjamin.

h. Berdasarkan PMK Nomor 30/PMK.08/2021 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat Untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, setiap pelaksanaan pembayaran klaim Jaminan Pemerintah Pusat mengakibatkan timbulnya piutang Pemerintah kepada Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional (PJPSN), kecuali jika Kementerian/Lembaga sebagai PJPSN.

i. Berdasarkan PMK Nomor 28/PMK.08/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, pelaksanaan pembayaran klaim dukungan loss limit yang berasal dari dana cadangan penjaminan, tidak mengakibatkan piutang Pemerintah dan/atau Regres Pemerintah.

j. Berdasarkan PMK Nomor 27/PMK.08/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, pembayaran klaim atas pelaksanaan Penjaminan Pemerintah menimbulkan piutang dan/atau Regres dari LPEI/Pemerintah kepada Terjamin (pelaku usaha korporasi).

k. Berdasarkan PMK Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah Untuk Badan Usaha Milik Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, pembayaran klaim atas pelaksanaan Penjaminan Pemerintah menimbulkan piutang dan/atau Regres dari PT PII/Pemerintah kepada Terjamin (BUMN penugasan).

l. Berdasarkan PMK Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, pembayaran klaim penjaminan kepada Penerima Jaminan atas porsinya timbul piutang dalam bentuk Regres kepada Terjamin.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Anggaran Kewajiban Penjaminan

Sampai dengan Desember Tahun 2023, tidak terdapat gagal bayar (default) pihak terjamin (BUMN, BUMD, PJPK/PJPSN/Badan Usaha) yang mendapat jaminan Pemerintah untuk seluruh program penjaminan, sehingga Pemerintah tidak mempunyai kewajiban pembayaran klaim penjaminan kepada kreditur/badan usaha untuk seluruh program penjaminan atau NIHIL.

Dalam APBN TA 2023 telah dialokasikan anggaran kewajiban penjaminan sebesar Rp330,5 miliar (Rp296,15 miliar untuk program percepatan pembangunan infrastruktur nasional dan Rp34,35 miliar untuk program penugasan pembiayaan infrastruktur daerah) yang telah direalisasikan untuk dipindahbukukan ke rekening dana cadangan penjaminan.

Adapun saldo akumulasi pada rekening dana cadangan penjaminan pemerintah sampai dengan akhir Desember Tahun 2023 sebesar Rp11,81 triliun dan saldo rekening dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah sebesar Rp406,87 miliar.

Pendirian PT Mineral Industri Indonesia (Persero)

Dalam rangka untuk mengembangkan ekosistem bisnis industri pertambangan yang lebih optimal dan efisien, serta melanjutkan kebijakan Pemerintah dalam holding pertambangan sebagaimana

tercantum pada PP Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium, maka perlu dibentuk strategic holding dengan mendirikan Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan sebagai induk. Pemisahan ini merupakan tindak lanjut dari Kajian Pembentukan Holding BUMN Industri Pertambangan Tahun 2017 dimana disebutkan bahwa bentuk akhir dari Holding BUMN Industri Pertambangan merupakan Strategic Holding.

Pendirian PT Mineral Industri Indonesia (Persero) sebagai induk holding pertambangan dilaksanakan melalui pengalihan saham Negara Republik Indonesia pada 4 Perusahaan Negara dan saham Negara Republik Indonesia pada PT Freeport Indonesia ke dalam PT Mineral Industri Indonesia (Persero) sebesar 119.090.865 lembar saham yang seluruhnya bernilai Rp119.090.865.000.000 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 516/KMK.06/2022 dengan nilai sebesar:

No	Perusahaan	Jumlah dan Jenis Saham	Nilai Saham
1	PT Aneka Tambang Tbk	15.619.999.999 Seri B	Rp40.664.608.000.000
2	PT Timah Tbk	4.841.053.951 Seri B	Rp8.852.211.000.000
3	PT Bukit Asam Tbk	7.490.437.495 Seri B	Rp23.900.896.000.000
4	PT Indonesia Asahan Aluminium	13.087.325 Seri B	Rp35.028.476.000.000
5	PT Freeport Indonesia	21.300	Rp10.644.674.000.000
Total			**Rp119.090.865.000.000**

Pada tanggal 15 Februari 2023 telah dilakukan pengalihan saham negara Republik Indonesia pada PT Indonesia Asahan Alumunium, PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk dan PT Freeport Indonesia ke dalam modal saham PT Mineral Industri Indonesia (Persero). Dengan demikian, PT Mineral Industri Indonesia (Persero) resmi menjadi induk holding pertambangan, sementara PT Indonesia Asahan Aluminium berubah status menjadi anak perusahaan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) dan berstatus PPKNM. Selain itu, PT Indonesia Asahan Aluminium tidak lagi memiliki saham pada PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk dan PT Freeport Indonesia.

D.3.4.5. Integrasi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia ke dalam PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)

Dalam rangka memperkuat holding BUMN Pariwisata, Kementerian BUMN mengintegrasikan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) ke dalam PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero). Pelaksanaannya dilakukan melalui inbreng saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) ke dalam PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) sebanyak 2.147.659 lembar saham yang seluruhnya senilai Rp11.679.371.855.665 sesuai PP Nomor 3 Tahun 2023 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2023 tanggal 10 Februari 2023.

Pada tanggal 5 Mei 2023 telah dilakukan pengalihan saham negara RI pada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) ke dalam PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) sesuai surat Menteri BUMN No. S-238/MBU/05/2023 tanggal 5 Mei 2023, yang mengakibatkan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia berubah status menjadi anak perusahaan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) dan berstatus PPKNM.

D.3.4.6. Penggabungan BUMN Transportasi Jalan

Dalam rangka meningkatkan konektivitas nasional guna mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas penyelenggara jasa transportasi jalan yang berkelanjutan, serta menyediakan layanan transportasi yang terstandardisasi guna meningkatkan kepuasan bagi pelanggan, perlu melakukan penggabungan Perusahaan Umum (Perum) Pengangkatan Penumpang Djakarta ke dalam Perusahaan Umum (Perum) DAMRI. Dengan dilakukannya penggabungan ini, Perum PPD dinyatakan bubar tanpa likuidasi dengan ketentuan segala hak dan kewajiban serta kekayaan Perum PPD beralih karena hukum kepada Perum DAMRI. Penggabungan kedua BUMN ini diresmikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penggabungan Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta ke dalam Perusahaan Umum (Perum) DAMRI.

Pada tanggal 8 Desember 2023 telah dilakukan penetapan nilai kekayaan yang dialihkan dalam penggabungan Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta ke dalam Perum DAMRI sesuai surat Menteri BUMN No. S-615/MBU/12/2023 tanggal 8 Desember 2023. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK No.468/KMK.06/2023 nilai kekayaan Perum PPD yang digabungkan ke dalam Perum DAMRI ditetapkan sebesar Rp853.085.167.681,00 (delapan ratus lima puluh tiga miliar delapan puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah). Atas penggabungan tersebut, entitas Perum PPD telah lebur ke dalam Perum Damri sehingga pencatatan investasi pemerintah pada Perum PPD dihapuskan.

D.3.4.7. Pengalihan Pembinaan PT Bina Karya (Persero) kepada Kementerian Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Bina Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) maka:

a. Pembinaan PT Bina Karya (Persero) dialihkan kembali kepada Kementerian Keuangan;
b. Dilakukan perubahan maksud dan tujuan PT Bina Karya (Persero) yaitu untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagai perusahaan holding, melaksanakan kegiatan usaha untuk mendukung Pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara serta Daerah Mitra, termasuk kegiatan usaha di bidang industri konstruksi, perdagangan dan layanan jasa.

D.3.4.8. Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum PFN menjadi PT Produksi Film Negara (Persero)

Dalam rangka meningkatkan kinerja, tata kelola, pengembangan usaha, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengusahaan dan pelayanan barang dan jasa di bidang film dan konten, mengembangkan sistem bisnis perfilman kepada pengguna jasa perfilman, serta mendukung pengadaan film yang bermutu, bernilai Pendidikan, dan berpijak pada kebudayaan nasional, perlu mengubah bentuk badan hukum Perum PFN yang statusnya sebagai Perusahaan Umum (Perum) ditetapkan berdasarkan PP Nomor 5 tahun 1988 tentang Pengalihan Bentuk Pusat Produksi Film Negara Menjadi Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2023 tanggal 10 Agustus 2023 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Produksi Film Negara Menjadi Perusahaan Perseroan, Perum Produksi Film Negara menjadi PT Produksi Film Negara (Persero).

D.3.4.9. Pembentukan Subholding PalmCo dan SupportingCo

Dalam rangka mewujudkan kemandirian di bidang ketahanan pangan dan energi, serta memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan melalui hilirisasi sektor pangan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan melalui Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dan juga membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim melalui akselerasi pengembangan energi terbarukan Kementerian BUMN menggabungkan 13 perusahaan di bawah holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) menjadi dua subholding yakni PalmCo dan SupportingCo.

PalmCo didorong untuk fokus meningkatkan hilirisasi produk-produk kelapa sawit serta diharapkan menjadi Perusahaan sawit terbesar di dunia dari sisi luas lahan yang mencapai lebih dari 600.000 hektare pada 2026. Adapun, SupportingCo akan menjadi perusahaan pengelola asset Perkebunan unggul, yang mencakup kegiatan pemanfaatan asset Perkebunan melalui optimalisasi dan divestasi asset, pengelolaan tanaman Perkebunan, serta diversifikasi usaha lainnya. Menteri BUMN melalui surat Nomor S-595/MBU/11/2023 tangggal 28 November 2023 perihal Persetujuan atas Integrasi PTPN Grup telah menyetujui:

a. Pemisahan tidak murni (spin off) usaha perkebunan kelapa sawit dan karet PT PTPN III (Persero) dengan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva bisnis kelapa sawit dan karet PT PTPN III (Persero) kepada PT PTPN IV;
b. Penambahan penyertaan modal PT PTPN III (Persero) kepada PT PTPN IV sebanyak 2.456.849 saham atau seluruhnya sebesar Rp2.456.849.000.000,- atau setara dengan 2,93% saham dalam PT PTPN IV sebagai kompensasi dari pemisahan tidak murni;
c. Penggabungan PTPN V, PTPN VI dan PTPN XIII ke dalam PTPN IV (Sub Holding PalmCo); serta
d. Penggabungan PTPN II, PTPN VII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, dan PTPN XIV ke dalam PTPN I (Sub Holding SupportingCo).

Terkait dengan penggabungan pada poin 3 dan 4 di atas, persentase kepemilikan pemerintah pada PTPN I dan PTPN IV pasca penggabungan masih dalam proses perhitungan, sedangkan untuk investasi pemerintah pada PTPN II, PTPN VII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, PTPN XIV, PTPN V, PTPN VI, dan PTPN XIII yang pada periode sebelumnya dicatat melalui metode biaya telah dihapuskan sebagaimana penerapan atas perusahaan negara yang di merger sebelumnya.

Perubahan kepemilikan negara atas PTPN I dan PTPN IV

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0074929.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perkebunan Nusantara I, terdapat perubahan kepemilikan saham dikarenakan adanya pembentukan SubHolding SupportingCo dengan rincian sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Jenis dan Lembar Saham	Nilai
1	PT PTPN III (Persero)	7.995.757 Seri B	7.995.757.000.000
2	Negara Republik Indonesia	1 Seri A	1.000.000
3	Negara Republik Indonesia	946.238 Seri B	946.238.000.000
Total			**8.941.996.000.000**

Dengan adanya perubahan ini, kepemilikan negara pada PT PTPN I yang semula 24% menjadi 10,58%. Sehingga pencatatan PT PTPN I dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara yang semula dengan menggunakan metode ekuitas (equity method) menjadi metode biaya (cost method).

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0074926.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perkebunan Nusantara IV, terdapat perubahan kepemilikan saham dikarenakan adanya pembentukan SubHolding PalmCo dengan rincian sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Jenis dan Lembar Saham	Nilai
1	PT PTPN III (Persero)	5.344.622 Seri B	5.344.622.000.000
2	Negara Republik Indonesia	1 Seri A	1.000.000
3	Negara Republik Indonesia	593.846 Seri B	593.846.000.000
Total			**5.938.469.000.000**

D.3.4.10. Perkembangan Pembubaran BUMN

Berdasarkan arahan Presiden RI dalam Rapat Internal Pembentukan Holding Danareksa – PPA tanggal 8 Maret 2021 dan Rakor KBUMN tanggal 14 Oktober 2021 mengenai BUMN yang mengalami kinerja operasional dan keuangan yang buruk untuk dilakukan penutupan. Dalam rangka menindaklanjuti arahan tersebut Menteri BUMN telah menyampaikan rencana pembubaran Tujuh BUMN kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor SR-1009/MBU/12/2021 tanggal 22 Desember 2021.

Tujuh BUMN yang dinilai tidak layak dipertahankan sehingga diusulkan untuk dilakukan pembubaran, antara lain PT Kertas Leces (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Industri Gelas (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Istaka Karya (Persero), dan PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero). Menteri Keuangan telah memberikan tanggapan melalui surat No. S-494/MK.06/2022 tanggal 7 Juni 2022 yang menyampaikan sependapat tujuh BUMN tersebut dapat dibubarkan.

Rencana Pembubaran tujuh BUMN dimaksud terbagi dalam tiga kategori, yaitu pembubaran melalui RUPS, Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) dan Pembubaran atas BUMN yang saat ini telah dalam status kepailitan, dengan rincian sebagai berikut:

No	BUMN	Kondisi	Skema Penutupan
Pembubaran melalui RUPS			
1	PT Industri Gelas (Persero)	• Operasi berhenti sejak 2015. • Fasilitas produksi sudah obsolete.	RUPS Pembubaran
2	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	• Berhenti produksi sejak 2008. • Fasilitas produksi sudah obsolete. • Ketersediaan bahan baku sangat terbatas • Sejak 2012 pendapatan berasal dari optimalisasi pembangkit listrik bersama PLN dengan skema KSO sewa pembangkit dengan Pi BS.	RUPS Pembubaran

No	BUMN	Kondisi	Skema Penutupan
3	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	• Industri dalam fase *sunset*. • Fasilitas produksi tidak kompetitif. • Pendapatan berasal dari penyewaan aset tetap.	• Penyelesaian Laporan Audit 2021 • RUPS Pembubaran
4	PT PANN (Persero)	Sudah tidak menjalankan *core business*.	• Penjualan aset PT PANN berupa saham anak perusahaan (PT PPM) • RUPS Pembubaran
Pembubaran melalui Pembatalan Putusan PKPU/Homologasi			
1	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	• Tidak beroperasi sejak 2014. • Tidak berjalannya skenario penyehatan sebagaimana putusan PKPU.	Pembatalan perjanjian perdamaian (homologasi) oleh PT PPA sebagai kreditur.
2	PT Istaka Karya (Persero)	• Saat ini masih menjalankan kegiatan operasional namun mengalami kesulitan permodalan. • Tidak memiliki keunggulan kompetitif. • Tidak mampu menjalankan putusan PKPU.	Pembatalan oleh kreditur homologasi.
Dalam Kepailitan			
1	PT Kertas Leces (Persero)	• Telah dinyatakan pailit oleh PN Niaga Surabaya pada 2018. • Seluruh SDM telah di-PHK.	Penyelesaian penjualan tanah/bangunan oleh kurator

Sampai dengan saat ini, perkembangan proses pembubaran 7 (tujuh) BUMN tersebut, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RUPS Pembubaran pada 3 BUMN
   a. PT Industri Sandang Nusantara (Persero) telah dilaksanakan RUPS Pembubaran melalui surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-90/MBU/02/2022 pada tanggal 2 Februari 2022. Pada tanggal 17 Maret 2023 sudah diterbitkan Peratuan Pemerintah No. 14 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara.
   b. PT Iglas (Persero) telah dilaksanakan RUPS Pembubaran melalui surat keputusan RUPS Nomor: S-149/MBU/03/2022 pada tanggal 10 Maret 2022. Pada tanggal 3 April 2023 sudah diterbitkan Peratuan Pemerintah No. 18 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Gelas. Dalam ILKPN Audited 2023, laporan termutakhir PT Industri Gelas berstatus Triwulan III 2022.
   c. PT Kertas Kraft Aceh (Persero) telah dilaksanakan RUPS Pembubaran melalui RUPS Luar biasa KKA pada tanggal 11 Maret 2022 ("RUPS Pembubaran KKA") sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kertas Kraft Aceh (Persero) No. 07 tanggal 11 Maret 2022. Pada tanggal 3 April 2023 sudah diterbitkan Peratuan Pemerintah No. 17 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh. Dalam ILKPN Audited 2023, laporan termutakhir PT Kertas Kraft Aceh berstatus Unaudited 2021.
   d. PT PANN (Persero) saat ini sedang dalam tahapan proses penerbitan PP Pembubaran PT PANN (Persero) di mana pada Desember 2023 telah terbit surat Menteri BUMN terkait permohonan penerbitan PP Pembubaran PT PANN (Persero) kepada Kementerian Sekretariat Negara.

2. Pelaksanaan pembatalan perjanjian putusan PKPU / Homologasi pada 2 BUMN
   a. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) dinyatakan pailit dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Sby Jo. Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby pada tanggal 2 Juni 2022. Pada

tanggal 20 Februari 2023 sudah diterbitkan Peratuan Pemerintah No. 8 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines.

b. PT Istaka Karya (Persero) dinyatakan pailit dan harta pailit berada dalam keadaan insolven berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 26/Pdt.Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 12 Juli 2022. Pada tanggal 17 Maret 2023 sudah diterbitkan Peratuan Pemerintah No. 13 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya.

3. Pelaksanaan dalam Kepailitan

PT Kertas Leces (Persero) dinyatakan pailit dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 tanggal 28 Maret 2019. Pada tanggal 20 Februari 2023 sudah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces. Dalam ILKPN Audited 2023, laporan termutakhir PT Kertas Leces berstatus Triwulan III 2018.

D.3.5. BA 999.04

1. Penyelesaian Piutang Negara Melalui Program Restrukturisasi Pinjaman PDAM

Landasan hukum mekanisme penyelesaian piutang negara pada PDAM diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 35 Tahun 2017.
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, RDI, dan RPD pada Badan Usaha Milik Daerah Tertentu.

Skema penyelesaian piutang Negara dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Tertentu sebagai berikut:

a. Penjadwalan kembali seluruh kewajiban Pokok dan/atau.
b. Penghapusan seluruh kewajiban Non Pokok.

Selama Tahun 2023, terdapat 1 PDAM telah selesai proses penyelesaian piutang negara, yaitu PDAM Kota Ambon melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 265 Tahun 2023 tentang Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara Non Pokok Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri Atas Nama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon tanggal 14 Juli 2023 dengan dengan nilai Rp589.182.544,00.

No	Debitur	Yang Menetapkan	Surat Penertapan	Nilai Piutang Non Pokok (Rp)
1.	PDAM Kota Ambon	Menteri Keuangan	KMK Nomor 440 /KMK.05/2022	589.182.544
Jumlah				**589.182.544**

2. Penyelesaian Piutang Negara Melalui Program Restrukturisasi Pemda

Latar belakang kebijakan penyelesaian piutang Negara pada Pemda adalah:

a. Tunggakan pinjaman Pemda tidak selesai selama bertahun-tahun.

b. Pemda tidak dapat melakukan investasi infrastruktur melalui skema pinjaman karena masih terdapat tunggakan pinjaman kepada pemerintah.
c. Membantu percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.
d. Membuka kesempatan Pemda dalam melakukan investasi.

Landasan hukum mekanisme penyelesaian piutang negara pada Pemda diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 35 Tahun 2017.
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) 104/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 176/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah.

Skema penyelesaian Piutang Negara sebagaimana diatur dalam PMK No.104/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 176/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah, secara umum dilaksanakan dengan:

a. Penjadwalan kembali.
b. Perubahan persyaratan dan/atau.
c. Penghapusan tunggakan non pokok melalui skema debt swap untuk penyediaan sarana dan prasarana pada fungsi pendidikan, kesehatan, dan/atau infrastruktur yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

Sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat lima Pemda dalam proses penyelesaian piutang negara, dengan rincian sebagai berikut:

a. 1 Pemda dalam proses penyelsaian restrukturisasi pelaksanaan *debt swap* yaitu pemprov Maluku;
b. 1 Pemda telah mendapat penetapan penghapusan secara bersyarat Piutang Negara non pokok oleh Presiden dan saat ini masih melaksanakan pembayaran pokok yaitu Pemkab Lampung Utara;
c. 1 Pemda telah mendapat penetapan penghapusan secara bersyarat piutang negara non pokok oleh Presiden dan telah melunasi pembayaran pokok yaitu Pemkab Lampung Tengah. Pemkab Lampung Tengah saat ini dalam proses penghapusan piutang negara non pokok secara mutlak;
d. 1 Pemda dalam proses penghapusan piutang negara non pokok secara mutlak yaitu Pemkot Makassar;
e. 1 Pemda dalam proses cicilan melalui potongan Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu Pemkab Aceh Timur.

3. Usaha-Usaha Penyelesaian Tunggakan Kredit Program Non Subsidi

a. Proyek Perkebunan

Proyek Perkebunan terdiri dari Proyek PIR dan Proyek UPP Perkebunan. Proyek PIR dimulai tahun 1976 (Repelita II) dan sampai tahun 1992 telah ada di 68 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sedangkan UPP terdiri dari 4 Proyek, yaitu P3RSU, P3RSB, PRPTE, dan TCSDP yang juga tersebar di 30 provinsi.

Pada tahun 2010 telah dilakukan rekonsiliasi sisa utang Proyek PIR/UPP Perkebunan yang melibatkan pihak perbankan sebagai bank penatausaha, Ditjen Perkebunan sebagai penanggung jawab program, PT Perkebunan Nusantara sebagai perusahaan inti untuk PIR, dan Dinas Perkebunan sebagai pihak yang menerima pelimpahan tugas/pengelolaan UPP setelah UPP ditutup oleh Menteri Pertanian.

Kemudian, untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penyebab tunggakan perlu diketahui kondisi dan permasalahan petani/kebun. Untuk itu, telah dilakukan uji petik di 15 lokasi Proyek PIR/UPP Perkebunan yang melibatkan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Perkebunan, perbankan, dan Dinas Perkebunan Provinsi. Uji petik ini dilakukan dengan melihat kondisi kebun, mewawancarai petani/kelompok tani serta memberikan kuesioner. Petani yang menjadi responden adalah 212 orang untuk PIR dan 104 orang untuk UPP. Berdasarkan uji petik diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1) Sebagian petani saat ini sudah tidak memelihara kebunnya sesuai dengan aturan, dikarenakan kurangnya biaya untuk pemeliharaan.
2) Kondisi kebun sebagian rusak berat karena kurangnya pemeliharaan.
3) Hanya sedikit petani yang membayar cicilan kredit.
4) Sudah tidak ada petugas penyuluh lapangan di lokasi proyek yang memungut angsuran petani karena ditarik ke instansi lain setelah otonomi daerah.

Kemudian pada November 2010 telah dilakukan invetarisasi di lima lokasi Proyek PIR Perkebunan lingkup PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I/Aceh dengan melibatkan BPKP. Tim telah bertemu dan melakukan wawancara serta memberikan kuesioner kepada kelompok petani/pekebun dan pihak perbankan. Adapun kesimpulan dari inventarisasi di lima lokasi Proyek PIR Perkebunan lingkup PTPN I adalah:

1) lahan perkebunan sebagian besar sudah ditinggalkan oleh petani peserta akibat kondisi keamanan yang tidak kondusif ditambah dengan kondisi tanaman yang sudah rusak berat, tidak terpelihara dan sudah menjadi hutan kembali.
2) kondisi bangunan kantor, gudang, dan fasilitas lainnya rusak berat, bahkan terdapat bangunan yang hanya tersisa puing-puingnya karena dibakar.
3) peralatan pertanian, peralatan berat dan peralatan angkutan sudah tidak ada (dibakar, hilang atau diambil Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
4) pada saat inventarisasi sudah tidak ada petugas kebun/dialihkan ke kebun lain.

Upaya penyelesaian piutang negara pada Proyek PIR/UPP tersebut dilanjutkan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK. 05/2012 tanggal 4 Juli 2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara pada Petani Peserta eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat dan eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan, yang telah direvisi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 /PMK.05/2015 tanggal 31 Desember 2015.

Peraturan Menteri Keuangan tersebut kemudian didukung dengan pedoman teknis pelaksanaan penyelesaian piutang negara yang diterbitkan oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/OT.140/12/2012 tanggal 14 Desember 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengendalian dan Penyelesaian Piutang Negara pada Petani Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan dan Unit Pelaksana Proyek Perkebunan. Diharapkan dengan diterbitkannya dua Peraturan Menteri tersebut pelaksanaan penyelesaian piutang negara pada Proyek PIR/UPP lebih optimal.

Tahun 2019 Direktorat SMI menginisiasi untuk pengembangan aplikasi penatausahaan data hutang petani yang dinamai aplikasi Penyelesaian Hutang Petani (PHP), diharapkan pengembagan aplikasi tersebut dapat memudahkan proses penyelesaian hutang petani PIR UPP Perkebunan.

Di tahun 2021 telah diterbitkan KMK Mutlak untuk 330 petani eks proyek Durian Luncuk. Dan di tahun 2022 Direktorat SMI bekerjasama dengan BPKP dalam penyusunan Pedoman Audit Penyelesaian Piutang Negara pada Petani Eks Proyek PIR UPP Perkebunan guna memudah BPKP daerah dalam melakukan audit terhadap proyek PIR UPP tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi Pengelolaan Penerusan Pinjaman:

1) Nilai *outstanding piutang* pokok transaksi Aset Lainnya Kredit Program disajikan sebagai Aset Lainnya Kredit Program pada pos Piutang Jangka Panjang di Neraca;
2) Transaksi pengesahan atau pelunasan dan/atau cicilan secara kas atas piutang pokok transaksi Aset Lainnya Kredit Program disajikan sebagai penerimaan pembiayaan di LRA dalam pos Pembiayaan, dan mengurangi nilai *outstanding* Aset Lainnya Kredit Program pada pos Piutang Jangka Panjang di Neraca;
3) Dalam hal setoran tidak teridentifiksi Surat Pengakuan Hutangnya (SPH), disajikan sebagai pendapatan PNBP lainnya di LRA dan sebagai pendapatan PNBP Lainnya pada pos kegiatan non-operasional lainnya di LO;

Sehingga pada tahun 2023 dilakukan koreksi piutang aset lainnya kredit program akibat koreksi penatausahaan setoran penerimaan PIR/UPP Non SPH. Atas setoran PIR UPP Non SPH pada Tahun Anggaran Berjalan (TAB) 2023 yang telah dicatat sebagai penerimaan pembiayaan, sesuai Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar dilakukan koreksi untuk diklasifikasikan sebagai Penerimaan PNBP Lainnya dengan akun 425981 (Penerimaan Lainnya dari Piutang Pemberian Pinjaman) dan menambah nilai *outstanding* piutang. Sedangkan setoran PIR UPP non SPH pada Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) yang telah dicatat sebagai penerimaan pembiayaan, dilakukan koreksi tambah nilai *outstanding* piutang. Berikut nilai setoran PIR UPP Non SPH yang dilakukan koreksi pada Tahun Anggaran Berjalan (TAB) dan Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL):

No	Tahun	Penerimaan PIR UPP Non SPH	Keterangan
Tahun Anggaran Berjalan			
1	2023	Rp196.022.154,00	Setoran PIR UPP Non SPH periode 1 Janauari – 30 September 2023, 1 Oktober – 31 Desember 2023 telah diklasifikasikan Penerimaan PNBP Lainnya
Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)			
1	2022	Rp490.911.557,00	Setoran PIR UPP Non SPH Tahun 2022

2	2021	Rp469.529.095,00	Setoran PIR UPP Non SPH Tahun 2021
3	2020	Rp255.089.349,00	Setoran PIR UPP Non SPH Tahun 2020
4	2019	Rp265.346.516,00	Setoran PIR UPP Non SPH Tahun 2019
5	2018	Rp372.641.952,00	Setoran PIR UPP Non SPH Tahun 2018
6	2017	Rp475.024.232,00	Setoran PIR UPP Non SPH Tahun 2017
7	2016	Rp245.726.673,00	Setoran PIR UPP Non SPH Tahun 2016
	Total	**Rp2.770.291.528,00**	

b. Proyek Peternakan

Proyek Peternakan terdiri dari Proyek Pembibitan dan Pengembangan Sapi Bali (P3 Bali) dan Redistribusi ternak yang dimulai sejak tahun 1990 yang berlokasi di Bali dan Nusa Tenggara Barat (Dompu), sedangkan Proyek Redistribusi Ternak dimulai sejak tahun 1978 dan tersebar di seluruh Indonesia. Untuk mengetahui gambaran tentang kondisi terkini, pada tahun 2010 telah dilakukan uji petik di Dompu, NTB oleh Ditjen Peternakan dengan hasil sebagai berikut:

1) Ternak sapi sudah tidak diketahui keberadaannya.
2) Kondisi bangun kantor dan fasilitas lainnya sudah rusak dan tidak terurus.
3) Peternak/kelompok ternak sudah tidak diketahui keberadaannya.

Di Tahun 2023 Itjen Kementerian Keuangan melakukan inventarisasi terhadap kredit program lama yang macet termasuk Proyek Pengembangan Sapi Bali (P3 Bali) dan Redistribusi ternak, namun belum ada kelanjutannya.

c. Proyek Pengembangan Pendidikan Akuntansi (P2A)

P2A adalah proyek yang dilaksanakan oleh Ditjen Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga, dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah lulusan kursus akuntansi yang dapat bekerja, meningkatkan jumlah lembaga kursus akuntansi yang dapat memperoleh akreditasi, serta memantapkan sistem dan mekanisme pengujian dan sertifikasi akuntansi. Pada tanggal 29 Juni 2010, dilakukan rapat persiapan dan koordinasi dalam rangka rekonsiliasi dan pengumpulan data piutang Pemerintah pada Proyek P2A dengan melibatkan Dit. SMI dan Ditjen Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Kemendiknas yang merupakan reorganisasi dari Ditjen Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga. Peserta rapat sepakat perlunya dibentuk Tim Kerja Penyelesaian Proyek P2A yang melibatkan Direktorat SMI dan Ditjen PNFI.

Menindaklanjuti kesepakatan rapat dimaksud, Dirjen PNFI dan Direktur SMI menunjuk petugas untuk duduk dalam Tim Tindak Lanjut Penyelesaian Proyek P2A yang tugasnya melakukan visitasi dan penelusuran data dalam rangka tindak lanjut P2A. Namun demikian, setelah Ditjen PNFI menyampaikan surat kepada Itjen Kemendiknas perihal Permintaan Data Proyek P2A, pihak Itjen Kemendiknas memberikan jawaban bahwa tidak terdapat data pemeriksaan terhadap Proyek P2A dimaksud di Kemendiknas.

Ditjen PNFI juga telah melakukan rapat koordinasi intern Ditjen PNFI tentang pengumpulan data-data P2A dengan melibatkan pensiunan-pensiunan pegawai Kemendiknas yang pernah terlibat dalam proyek P2A, namun Ditjen PNFI mengalami kesulitan dalam melakukan penelusuran dan pengumpulan data proyek P2A dimaksud. Selanjutnya, Ditjen PNFI melalui Setditjen PNFI

menyampaikan surat permintaan data-data lembaga yang pernah menerima bantuan dalan Proyek P2A kepada 33 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi di Indonesia, namun baru dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali yang telah memberikan jawaban atas surat Ditjen PNFI dimaksud.

Ditjen PNFI juga telah menyampaikan surat kepada Pimpinan LP3I dan LPK Wijaya Kusuma (Jakarta) serta LPK Jurnal (Garut) perihal permintaan informasi proyek P2A mengingat ketiga lembaga termasuk yang pernah menerima dana bantuan Proyek P2A, namun baru Pimpinan LPK Jurnal yang telah menyampaikan jawaban bahwa kewajibannya telah diselesaikan namun tidak dapat memberikan bukti pembayaran mengingat telah lebih dari 15 tahun.

Pada tanggal 21 s.d. 23 Desember 2010, Tim Direktorat SMI melaksanakan tugas monitoring ke Kabupaten Malang dalam rangka penelusuran data Proyek P2A. Monitoring dilakukan dengan melakukan visitasi dan penelusuran data ke Bank BRI Cabang Malang dan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang serta melakukan visitasi dan penelusuran ke LKP Ganesha yang pernah mendapatkan bantuan dalam Proyek P2A. Mengingat belum adanya surat tanggapan atas surat permintaan data yang telah disampaikan oleh Ditjen PNFI kepada Pimpinan LP3I dan LPK Wijaya Kusuma (Jakarta), perwakilan dari Ditjen PNFI telah melakukan penelusuran Proyek P2A secara langsung kepada kedua lembaga dimaksud, namun diperoleh informasi bahwa kedua lembaga dimaksud belum memperoleh data yang diminta dan dalam waktu dekat akan memberikan jawaban secara resmi atas surat permintaan data yang telah disampaikan oleh Ditjen PNFI.

Hingga saat ini, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) sebagai reorganisasi dari Ditjen PNFI, serta Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) masih mencoba melakukan penelusuran atas data-data proyek P2A dengan berkoordinasi dengan Dit. SMI.

Di tahun 2022 Itjen Kementerian Keuangan melakukan inventarisasi terhadap kredit program lama yang macet termasuk proyek P2A, namun belum ada kelanjutannya.

d. Kredit Listrik Pedesaan (KLP)

KLP adalah program Pemerintah dalam bentuk penyediaan dana untuk kredit biaya penyambungan dan pemasangan instalasi listrik di rumah konsumen, termasuk biaya asuransi melalui PT Askrindo. Berdasarkan temuan BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2009 terkait dengan hak tagih Pemerintah atas KLP yang masih diragukan nilai bersih yang dapat direalisasikan *(Net Realized Value),* maka perlu dilakukan langkah awal penyelesaian piutang Negara pada proyek KLP dengan melakukan rekonsiliasi dan pengumpulan data.

Pada 31 Desember 2010, telah dilakukan rapat antara Direktorat SMI, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan Bank BRI sebagai persiapan dan koordinasi dalam rangka rekonsiliasi dan pengumpulan data KLP serta menetapkan time line terkait penyelesaian permasalahan KLP dimaksud.

PLN dan Bank BRI mengundang Direktorat SMI guna melakukan verifikasi lapangan dan *sampling* data KLP di PLN Disjaya dan Tangerang (APJ Cisoka) serta Bank BRI Cabang Tangerang. Namun, Bank BRI dan PLN Tangerang mengalami kesulitan dalam melakukan penelusuran atas data-data dimaksud mengingat KLP di wilayah Tangerang dilaksanakan pada tahun 1986-1987 dan pencatatan saat itu dilakukan secara manual. Selanjutnya, telah disepakati bahwa akan dibentuk Tim Koordinasi KLP wilayah Tangerang untuk melakukan penelusuran ke langsung ke lapangan (pelanggan-pelanggan KLP) serta perlu dilakukan penelusuran data hingga ke Kantor Unit Bank BRI.

Menindaklanjuti kesepakatan dimaksud, PLN APJ Cisoka telah melakukan uji petik ke pelanggan KLP di Desa Saga dan Keronjo, namun sebagian sudah tidak lagi menjadi pelanggan/sudah dibongkar. Di samping itu, Bank BRI Cabang Tangerang juga telah meminta data KLP kepada seluruh Kantor Unit Bank BRI di Cabang Tangerang, namun data dimaksud tidak dapat ditemukan. Hingga saat ini, Bank BRI dan PLN masih mencoba melakukan penelusuran atas data-data KLP.

4. Usaha-usaha Penyelesaian Tunggakan Pemberian Pinjaman

Bank Beku Operasi (BBO)/Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU)/Bank Dalam Likuidasi (BDL)

Status beberapa bank swasta nasional menjadi BBO/BBKU/BDL, diantaranya merupakan bank penerima pinjaman *Two Step Loan* (TSL) dari BI dan BTN. BBO/BBKU/BDL meliputi PT Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), PT Bank Umum Nasional (BUN), PT Bank Asia Pasifik (ASPAC), PT Bank Usaha Pembiayaan Pembangunan Indonesia (UPPINDO), PT Bank Dagang Bali, PT UNIBANK, PT Bank Andromeda, PT Bank Central Dagang, PT Bank Papan Sejahtera, PT Bank Putra Surya Perkasa, dan BPD Timor Timur.

Langkah awal penyelesaian BBO/BBKU/BDL pada BI setelah pembekuan status tersebut, pihak Kementerian Keuangan, BI, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dan Tim Administrasi BBO/BBKU/BDL telah melakukan beberapa kali rekonsiliasi perhitungan posisi pinjaman TSL eks BBO/BBKU/BDL guna mengetahui perkembangan tingkat pengembalian atas pinjaman TSL dari BBO/BBKU/BDL. Berdasarkan Keputusan Ketua BPPN Nomor SK-36/BPPN/0204 tanggal 17 Februari 2004 tentang Penyelesaian Aset dan Kewajiban BBO/BBKU/BDL, disebutkan bahwa penyelesaian kewajiban Bank Beku akan dilakukan dengan cara memperhitungkan hasil penyelesaian aset Bank Beku dengan kewajiban Bank Beku. Terkait dengan penyelesaian beberapa permasalahan di bidang keuangan termasuk di dalamnya permasalahan BBO/BBKU/BDL yang menyalurkan kredit TSL, dibentuk Tim Penyelesaian Beberapa Permasalahan di Bidang Keuangan Kementerian Keuangan dan BI melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI Nomor 209/KMK.06/2005 dan Nomor 7/23/KEP.GBI/2005 tanggal 29 April 2005. Dalam pertemuan tanggal 28 Maret 2005, Tim Penyelesaian BPPN mengemukakan bahwa berdasarkan hasil likuidasi kelima bank BBO/BBKU/BDL, aset yang tersisa hanya cukup untuk mengurangi kewajiban utang pajak bank beku, utang bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang telah dialihkan hak dan penagihannya kepada BPPN, serta utang program penjaminan Pemerintah. Sedangkan utang kepada pihak lainnya tidak mampu ditutupi.

Pasal 3 Ayat 3.03 dari sebagian besar Perjanjian Pemberian Pinjaman (SLA) kepada BI yang terkait dengan Pemberian pinjaman kepada bank BBO/BBKU/BDL di atas, menyebutkan bahwa “BI harus memastikan bahwa setiap bank swasta memenuhi seluruh kewajibannya dalam Perjanjian Pinjaman, Perjanjian Pemberian Pinjaman dan Akad Pemberian Pinjaman, dan BI wajib mengikuti serta memantau perkembangan masing-masing Bank Swasta dalam melaksanakan Pinjaman Pemberian, mengambil segala upaya yang diperlukan untuk mencegah timbulnya keadaan atau hal-hal yang merugikan Pemerintah, keadaan atau hal-hal mana meliputi peristiwa yang disebutkan dalam Pasal V Perjanjian Pinjaman”. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, meskipun saat ini proses likuidasi bank BBO/BBKU/BDL telah selesai (bank BBO/BBKU/BDL sudah tidak beroperasi lagi dan tidak ada lagi proses BPPN terhadap BBO/BBKU/BDL), kiranya BI masih tetap memiliki kewajiban kepada Pemerintah untuk mengambil segala upaya yang diperlukan untuk mencegah timbulnya keadaan atau

hal-hal yang merugikan Pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (3.03) dari SLA kepada BI terkait dengan penyaluran TSL.

BBO/BBKU/BDL/BDL tidak dapat mengikuti proses restrukturisasi dengan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam PMK Nomor 17/2007 sehubungan dengan tidak adanya institusi yang akan memenuhi dokumen dokumen persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti restrukturisasi. Dalam rangka penyelesaian pinjaman TSL eks BBO/BBKU/BDL telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Permintaan konfirmasi atas tata cara penghapusan pinjaman terhadap entitas yang sudah tidak ada kepada Ditjen Kekayaan Negara (DJKN).
b. Pembahasan opsi penyelesaian dengan DJKN dan Biro Bantuan Hukum menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
    1) Penyelesaian melalui Panita Urusan Piutang Negara (PUPN) dengan tujuan penghapusan piutang setelah piutang diurus secara optimal dan diterbitkan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).
    2) Penyelesaian diluar mekanisme PUPN sebagaimana diatur dalam PP 14/2005 Bab IV terkait Piutang BUMN maupun Pemerintah Daerah.

Akan disusun tahapan-tahapan penyelesaian sesuai dengan kedua opsi tersebut. Berkaitan dengan tindak lanjut penyelesaian pinjaman BBO/BBKU/BDL, Menteri Keuangan telah menetapkan surat penghentian perhitungan non pokok melalui surat nomor S-626/MK.05/2015 tanggal 18 Agustus 2015. Sesuai dengan surat tersebut, penghentian perhitungan kewajiban non pokok dilakukan pada saat pembubaran/likuidasi entitas berkenaan, yaitu pada tanggal 26 April 2004.

Perkembangan selanjutnya, pada saat rapat pembahasan Penyelesaian Pengelolaan Two Step Loan (TSL) dari Bank Indonesia kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Nusa Dua Bali, Kementerian Keuangan menyampaikan pendapat bahwa Kementerian Keuangan tidak dapat menindaklanjuti penyelesaian TSL OLA (BBO/BBKU/BDL) sepanjang belum mendapatkan kejelasan mengenai konstruksi hukum, proses bisnis, dan data pendukung yang memadai. BI dan Kemenkeu harus memastikan bahwa telah ada dokumen hukum yang menyatakan bahwa debitur-debitur TSL OLA (BBO/BBKU/BDL) telah hapus status badan hukum dan diambil alih oleh Pemerintah.

Pada hari Rabu, 31 Maret 2021 telah dilaksanakan rapat pembahasan tindak lanjut penylesaian *Two Step Loan* (TSL) Bank Indonesia pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB, melalui fasilitas *video conference* menggunakan aplikasi Zoom dengan peserta perwakilan Biro Hukum, Biro Advokasi, Inspektur III, dan Direktorat SMI. Adapun beberapa poin penting hasil rapat pembahasan dengan para undangan adalah sebagai berikut:

a. BI tidak dapat mengalihkan pengurusan pengelolaan TSL kepada Pemerintah sebelum Pemerintah memutuskan untuk menerima pengelolaan tersebut dari BI. Sampai dengan saat itu, BI masih harus bertanggung jawab atas pengelolaan TSL sampai ditunjuk instansi/unit yang akan mengelolanya;
b. Apabila BI ingin mengalihkan pengelolaan TSL, maka dokumentasinya harus clear, data-data peminjamnya harus clear sampai dengan perjanjian juga mungkin harus dialihkan atas nama

Pemerintah dalam hal ini Dit. SMI agar debitur juga clear pada sat akan melakukan pembayaran dan penutupan perjanjian;

c. Pentingnya komitmen bersama dari pimpinan untuk mengambil sikap menerima atau menolak baik seluruh atau sebagian atas TSL ini. Hal tersebut penting agar kita dapat menentukan langkah-langkah yang dilakukan untuk menangani permasalahan ini;
d. Pasal 74 UU BI tahun 1999 belum bisa dijadikan dasar pengalihan TSL karena kita memberikan mandat melalui surat kuasa Menteri Keuangan untuk melakukan penatausahaan penerusan pinjaman. Maka dari itu, mandat tidak menghilangkan tanggung jawab Pemerintah atas penerusan pinjaman untuk melakukan penatausahaan TSL. Sehingga kalau maksudnya BI ingin mengalihkan TSL menjadi tidak tepat juga, mungking harusnya mengembalikan tanggung jawab kepada pemerintah;
e. Karena dulu pengelolaan TSL oleh BI diberikan melalui mandat surat kuasa, maka jika kita ingin melepaskan tanggung jawab BI dapat dilakukan dengan mencabut surat kuasa tersebut. Namun, jika misalnya tidak dicabut juga tidak mengapa karena kewenangan atas pengelolaan TSL pada prinsipnya masih di Menteri Keuangan;
f. Mengenai hal-hal teknis terkait pengalihan pengelolaan TSL BI, sebaiknya dicantumkan dalam PMK mengenai penatausahan TSL. Namun harus dipikirkan juga dasar hukum pembentukan PMK apakah ada amanat pembuatannya;
g. Permasalahan pengalihan pengelolaan TSL membutuhkan keputusan dari pimpinan mengingat banyaknya debitur yang sudah tidak ada wujudnya.

5. Penyelesaian Pinjaman BUMN

Progress Penyelesaian Piutang Negara Tahun 2023

Direktorat Sistem Manajemen Investasi melaksanakan fungsi koordinasi antar unit yang terkait dalam lingkup Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN selaku *Unit in Charge* dalam pelaksanaan program penyelesaian Piutang Negara pada BUMN/PT. Upaya perbaikan terus dilakukan agar pelaksanaan program lebih efektif dan efisien dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program selama tahun 2016. Pemerintah telah menerbitkan aturan hukum baru sebagai landasan pelaksanaan penyelesaian Piutang Negara pada BUMN/PT/Badan Hukum Lainnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Pemberian Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi Pada BUMN/PT/BHL.

Optimalisasi penyelesaian piutang negara dilakukan dengan cara:

a. Penjadwalan kembali;
b. Perubahan persyaratan;
c. *Debt to Asset Swap;*
d. PMN; dan/atau
e. Penghapusan

PMK Nomor 222/PMK.05/2019 tentang Perubahan PMK Nomor 13/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Pemberian Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi Pada BUMN/PT/BHL saat ini telah dicabut dengan PMK Nomor 211/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Pemberian Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi Pada BUMN/PT/BHL. Sesuai dengan

PMK Nomor 211/PMK.05/2021 dimaksud, optimalisasi penyelesaian piutang negara dilakukan dengan cara:

a. Penjadwalan kembali;
b. Perubahan persyaratan;
c. Debt to Asset Swap
d. PMN;
e. Penghapusan; dan/atau
f. Keringanan (*discount*) pembayaran.

Optimalisasi penyelesaian Piutang Negara dapat dilaksanakan dengan lebih dari 1 (satu) cara (lebih dari satu skema penyelesaian). Pada optimalisasi penyelesaian piutang negara melalui Perubahan Persyaratan terdapat penambahan cara yaitu dengan konversi kewajiban non pokok menjadi kewajiban pokok. Konversi kewajiban non pokok menjadi kewajiban pokok dimaksud hanya dapat dilakukan kepada BUMN atau Perseroan yang di dalamnya terdapat kepemilikan negara. Selanjutnya juga terdapat tambahan ketentuan berkenaan dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari konversi kewajiban non pokok menjadi kewajiban pokok dilakukan dalam hal terdapat kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan, perbaikan kinerja, dan organisasi BUMN/Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Progres Penyelesaian Piutang Negara pada PTPN XIV dan PTPN XI

Melalui surat Nomor: S.994/03.N14/X/XI/2019 tanggal 18 November 2019, Direksi PTPN XIV mengajukan mengajukan permohonan penyelesaian utang RDI/SLA dengan skema

1) Utang Pokok sebesar Rp84.702.120.539,08 di konversi menjadi PMN Non Tunai dan

2) Utang Non Pokok sebesar Rp121.709.486.635,46 dijadwalkan kembali.

Atas pengajuan tersebut, Direktorat SMI telah meneliti kelengkapan berkas persyaratan permohonan penyelesaian utang RDI/SLA dan masih terdapat dokumen persyaratan yang belum disampaikan oleh PTPN XIV. Melalui surat Direktur SMI Nomor S-375/PB.4/2019 tanggal 31 Desember 2019 telah meminta direksi PTPN XIV untuk segera menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung penyelesaian piutang Negara. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, dokumen yang belum diterima Direktorat SMI yaitu rekomendasi dari Kementerian BUMN terkait proses restrukturisasi utang PTPN XIV, belum disampaikan oleh direksi PTPN XIV.

Direktur SMI membatalkan permohonan restrukturisasi utang PTPN XIV melalui surat nomor S-123/PB.4/2021 tanggal 29 Maret 2021 karena dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam pasal 17 PMK Nomor 13/PMK.05/2016 tidak dapat dilengkapi dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak surat permohonan penyelesaian Piutang Negara diterima.

PTPN XIV saat ini telah menjadi bagian dalam Proyek Strategis Nasional PTPN Group (Supporting Co). Saat ini pembentukan sedang dalam proses, sehingga penyelesaian piutang negara pada PTPN XIV menunggu proses tersebut selesai agar dapat diketahui piutang negara tersebut akan dibebankan ke mana. Sebagai komitmen, PTPN XIV telah mengirim surat kepada Direktorat SMI Nomor S-644/05.N14/X/V/2023 perihal Penyelesaian Kewajiban SLA/RDI yang juga ditembuskan ke induk PTPN Group, yaitu PTPN III.

1) PTPN XI

PTPN XI tidak lagi membayar cicilan sejak tahun 2020 karena adanya proses revitalisasi/modernisasi perusahaan sehingga produksi belum optimal. Disamping itu, Direktorat SMI dan PTPN XI tidak memiliki dokumen fisik perjanjian pinjaman RDI No. 15/002/INV/1983. Berdasarkan PMK 211/2021, penyelesaian piutang negara pada BUMN dengan kriteria tertentu (Perjanjian Pinjaman tidak lengkap dan/atau tidak ditemukan namun nilai atau jumlah piutang negara tercatat atau diakui) dilakukan dengan terlebih dahulu membuat Surat Kesepakatan Utang (SKU) yang ditandatangani Dirjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dengan Direktur Utama/Direktur/pengurus BUMN.

Pada bulan Juli 2022, telah dilakukan kesepakatan antara Dit. SMI dan PTPN XI terkait penyelesaian piutang negara dengan terlebih dahulu membuat SKU. Poin-poin kesepakatan pada SKU antara lain:

- Besaran Piutang Negara sebesar Rp3.522.896.325;
- Jangka Waktu Pinjaman 5 tahun sejak tanggal penandatanganan SKU s.d. tanggal 15 Juni 2027;
- Pembayaran pertama akan dilakukan setelah penandatanganan SKU, selanjutnya per semester setiap tanggal 15 Juni dan 15 Desember;
- Tingkat Suku Bunga 0 persen.

Kemudian pada bulan Mei 2023, poin-poin kesepakatan tersebut diperbaharui yaitu jangka waktu pinjaman yang semula 5 tahun menjadi 4 tahun 6 bulan. Penyesuaian ini dilakukan setelah adanya arahan Dirjen Perbendaharaan untuk terlebih dahulu mencari ulang fisik dokumen perjanjian RDI sebelum dilakukan penyusunan perjanjian baru. Namun setelah dilakukan pencarian ulang, dokumen tersebut tetap tidak ditemukan.

SKU yang telah ditandatangani menjadi dasar persetujuan penyelesaian piutang negara oleh Menteri Keuangan. Persetujuan ini kemudian akan menjadi dasar pernyusunan perjanjian pinjaman RDI baru antara Kementerian Keuangan dan PTPN XI.

SKU telah ditandatangani oleh Dirjen Perbendaharaan dan Direktur Utama PTPN XI, serta telah diterbitkan surat persetujuan penyelesaian piutang negara oleh Menteri Keuangan. Saat ini perjanjian pinjaman telah diterbitkan dengn Nomor RDI-406/DSMI/2023 tanggal 12 Juli 2023 dan PTPN XI telah mulai membayar angsuran pertamanya pada tanggal 15 Juli 2023 yang dilanjutkan pembayaran untuk angsuran kedua pada tanggal 12 Desember 2023.

Pada tanggal 1 Desember 2023, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) mengumumkan penggabungan 13 (tiga belas) perusahaan di bawah Holding Perkebunan Nusantara, menjadi 2 (dua) Sub Holding, yakni Palm Co. dan Supporting Co. Subholding Supporting Co. dibentuk yang diantaranya melalui *merger* PTPN XI ke dalam PTPN I berdasarkan akta penggabungan No. 9 tanggal 1 Desember 2023 sehingga diperlukan novasi atas perjanjian utang PTPN XI menjadi PTPN I. Saat ini, proses administrasi pembentukan sedang berlangsung termasuk di dalamnya konsolidasi keuangan, sehingga penyelesaian piutang negara pada PTPN XIV menunggu proses tersebut selesai agar dapat diketahui piutang negara tersebut akan dibebankan ke mana.

2) Progres Penyelesaian Piutang Negara Lainnya

Berikut adalah progress penyelesaian piutang negara kepada beberapa BUMN, diantaranya:

a. PT Djakarta Llyod (Persero)

Pasca putusan PKPU, telah dilakukan amandemen perjanjian pinjaman PT Djakarta Lloyd (Persero). Dalam amandemen tersebut, apabila PT Djakarta Lloyd (Persero) tidak melakukan pembayaran kewajiban selama dua kali berturut-turut, maka seluruh kewajiban menjadi jatuh tempo. PT Djakarta Lloyd (Persero) (Dalam PKPU) tidak melakukan pembayaran dan telah menunggak pembayaran lebih dari dua kali berturut-turut sejak kewajiban jatuh tempo 31 Desember 2019 hingga saat ini.

Pada tanggal 19 September 2022 melalui surat nomor 177/KG.104.00/Dirut/IX/2022 PT Djakarta Lloyd (Persero) (Dalam PKPU) mengajukan permohonan penyelesaian piutang Negara berupa skema penjadwalan kembali terhadap seluruh kewajiban PT Djakarta Lloyd (Persero) (Dalam PKPU) yang telah jatuh tempo.

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya optimalisasi penyelesaian piutang negara baik melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) maupun restrukturisasi berdasarkan PMK No. 211/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi Pada BUMN/PT/BHL.

Upaya optimalisasi penyelesaian piutang melalui PUPN tidak dilanjutkan mengingat PT Djakarta Lloyd (Persero) masih memiliki prospek dan mendapatkan dukungan pemerintah. Menindaklanjuti penghentian penyelesaian piutang melalui PUPN, PT Djakarta Lloyd (Persero) telah mengajukan restrukturisasi melalui Surat No. 141/KE.104/00/DIRUT/XI/2023 tanggal 30 November 2023 hal Permohonan Penyelesaian Piutang Negara. Dalam proses optimalisasi penyelesaian piutang negara, PT Djakarta Lloyd (Persero) diputuskan dalam kondisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU S).

Pemerintah telah mengajukan tagihan kepada Tim Pengurus PT Djakarta Lloyd (Persero) pada tanggal 6 Desember 2023, dengan tagihan sebesar Rp168.361.692.009,78. Pemerintah akan mengikuti proses PKPU untuk mengoptimalkan penyelesaian piutang negara.

b. PT Merpati

Sehubungan dengan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 5/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.SBY Tanggal 2 September 2022 penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi tidak dapat dilakukan, hal ini dikarenakan PT Merpati sudah dibawah kurator. Atas hal tersebut sebagai pengganti BAR kami membuat konfirmasi negatif kepada kurator terkait nilai hak tagih pemerintah yang terdapat pada PT Merpati sebesar Rp2.903.906.442.233,08.

Tim Kurator melalui surat nomor 456/PAILIT-MNA/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 menyampaikan daftar pembagian hasil lelang tahap kedua yang salah satunya kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp13.583.347.714 dan telah diterima pada tanggal 31 Mei 2023. Selanjutnya Dit. SMI

akan mengusulkan penghapusan dan penutupan perjanjian setelah status badan hukum dilakukan pencabutan.

c. PT PANN

Telah diterbitkan Keppres 25/2022 tentang Program Penyusunan PP, salah satunya terkait RPP Pembubaran PT PANN. Telah dilakukan rapat awal Panitia Antar Kementerian (PAK) Penyusunan Rencana Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) pada tanggal 19 Oktober 2023. Untuk pengajuan tagihan piutang pada PT PANN masih menunggu terbentuknya tim likuidator yang dibentuk oleh PT PPA.

d. PT Kertas Kraft Aceh

Telah diterbitkan PP 17/2023 tentang Pembubaran PT KKA. Untuk pengajuan tagihan piutang pada PT KKA masih menunggu terbentuknya tim likuidator yang dibentuk oleh PT KKA. Berdasarkan akta berita acara RUPSLB PT KKA (Dalam Likuidasi) yang diterbitkan pada tanggal 24 Juli 2023 dilakukan penunjukkan Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H. sebagai likuidator PT KKA. Likuidator melalui surat nomor 002/KKA-LIKUIDASI/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 melakukan pemberitahuan pendaftaran pengajuan kreditor.

Direktur Sistem Manajemen Investasi melalui surat nomor S-258/PB.4/2023 tanggal 21 Agustus 2023 mengajukan tagihan atas pinjaman SLA-1207/DP3/2007 PT KKA dengan jumlah kewajiban sebesar $8.544.534,67. Telah dilakukan verifikasi piutang oleh Likuidator PT KKA pada tanggal 19 Oktober dan 23 Oktober 2023 dimana Likuidator menyetujui kewajiban PT KKA sebesar USD 8.544.534,67.

e. PT Kertas Leces

Telah diterbitkan PP 9/2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces tanggal 20 Februari 2023. Tim Kurator melalui surat nomor 881/PAILIT-KL/AG-RB-FEB/V/2023 tanggal 11 Mei 2023, menyampaikan bahwa Tim Kurator telah mencatatkan Tagihan Kemenkeu Sebesar Rp749. 817.814.012,54 ke dalam Daftar Piutang Tetap Kreditor Preferen PT Kertas Leces, dan telah dilakukan pembayaran kepada Pemerintah atas penjualan aset benda bergerak PT Kertas Leces senilai Rp11.796.914.354,13, sehingga Sisa Hak Tagih Pemerintah sebesar Rp 738.020.899.657,54. Saat ini sedang dilakukan pemberesan harta pailit berbentuk tanah. Pengajuan tagihan piutang pada PT Kertas Leces akan disampaikan setelah pemberesan aset tanah selesai.

f. PT Kertas Gowa

Penghapusan piutang pada PT Kertas Gowa akan dilakukan setelah Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen AHU) menyampaikan surat keterangan penghapusan status badan hukum PT Kertas Gowa. Direktur SMI sudah menyampaikan surat kepada Ditjen AHU nomor S-106/PB.4/2023 tanggal 13 April 2023 perihal Permohonan Surat Keterangan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan dan Penghapusan Nama Perseroan PT. Kertas Gowa dari Daftar Perseroan.

Melalui surat nomor AHU.2.UM.01.01-3146 tanggal 4 Agustus 2023, Direktur Perdata Ditjen AHU Kemenkumham menyampaikan tanggapan bahwa PT Kertas Gowa tidak tercatat melakukan perubahan atau pembubaran pada Sistem Administrasi Badan Hukum, juga dalam

arsip yang tersimpan di Ditjen AHU. Selanjutnya untuk pengumuman berakhirnya status badan hukum perseroan PT Kertas Gowa dalam Berita Negara, Ditjen AHU mengarahkan untuk berkoordinasi dengan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).

Direktur SMI telah menyampaikan Surat Permohonan Informasi atas Pengumuman Berakhirnya Status Badan Hukum PT Kertas Gowa pada Berita Negara Republik Indonesia kepada Direktur Umum PT Percetakan Negara Republik Indonesia (PT PNRI) melalui Surat nomor S-278/PB.4/2023 tanggal 11 September 2023. Pada tanggal 12 Desember 2023, telah dilaksanakan koordinasi dengan PT PNRI terkait Surat Direktur SMI No. S-278/PB.4/2023 tanggal 11 September 2023. Dari hasil koordinasi, PT PNRI menyampaikan bahwa dalam database Berita Negara RI belum ada pengumuman berakhirnya status badan hukum PT Kertas Gowa pada Berita Negara RI. namun belum ada surat tanggapan secara resmi dari PT PNRI.

b. Progres penyelesaian permohonan restrukturisasi pinjaman SLA dan RDI pada yang dititipkelolakan pada PT PPA

Pada klaster titip kelola danareksa-PPA terdapat penyelesaian utang SLA/RDI melalui pengadilan/penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yaitu pada PT Barata dan PT DPS dengan proses sebagai berikut:

1) PT Barata Indonesia

a) Berdasarkan Putusan sela majelis hakim pengadilan niaga Surabaya tanggal 23 Agustus 2021 dan pengumuman tim pengurus PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) tanggal 30 Agustus 2021;

b) Kewajiban dari pinjaman RDI dengan jumlah sampai dengan 23 Agustus 2021 sebesar Rp 76.268.526.518,41;

c) Progress terakhir pengesahan perjanjian perdamaian/homologasi telah ditentukan oleh Hakim Pemutus tanggal 6 Desember 2021, dengan skema penyelesaian melalui penjadwalan kembali (Pembayaran akan dilakukan sampai dengan 1% (satu persen) dari total kewajiban Perseroan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun dengan tetap tunduk CFADS (Cash Available for Debt Service) sejak Triwulan 1 Tahun 2022) dan opsi konversi atas sisa tagihan pada tahun ke-10 setelah tanggal homologasi.

d) Setelah Perjanjian Perdamaian tersebut di atas disahkan Majelis Hakim, sebagai bentuk pelaksanaan skema homologasi, PT Barata telah mengirimkan laporan terkait CFADS dengan rincian sebagai berikut:

No	Laporan	Nomor Surat Pengantar	Tanggal	Saldo CFADS/ Pembayaran
1	Review LK Tw II Tahun 2022	20 22 294	23 September 2022	Nihil
2	Review LK Tw III Tahun 2022	20 22 370	15 Desember 2022	Nihil
3	Review LK Tw IV Tahun 2022	20 23 121	23 Mei 2023	Nihil
4	Review LK Tw I Tahun 2023	20 23 191	29 Agustus 2023	Nihil
5	Review LK Tw II Tahun 2023	20 24 010	15 Januari 2024	Nihil

e) Selama tahun 2022 s.d. triwulan II tahun 2023, PT Barata belum memiliki kas yang tersedia untuk melakukan pembayaran pinjamannya.

2) PT Dok dan Perkapalan Surabaya

a) Hak Direktur Sistem Manajemen Investasi melalui surat nomor S-61/PB/PB.4/2021 tanggal 19 Oktober 2021 mengajukan tagihan atas pinjaman AMA-184/RDI-110/DSMI/2017 dan AMA-185/RDI-134/DSMI/2017 PT DPS dengan jumlah kewajiban sebesar Rp32.840.212.102,98;
b) Sesuai dengan Proposal Perdamaian PKPU PT DPS berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Salinan Putusan PKPU Nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 9 Februari 2023;
c) Adapun skema penyelesaian kewajiban RDI PT DPS yaitu setiap arus kas yang tersedia dan/atau dana yang telah digunakan untuk operasional dan pembayaran kepada Karyawan dan Pensiunan akan dibayarkan kepada Kementerian Keuangan melalui skema ballon payment selama 15 tahun dengan pembayaran mulai pada tahun ke 5 setelah tanggal homologasi.

c. Progres penyelesaian restrukturisasi pijaman pada klaster holding BUMN sebagai berikut:

1) Holding Pangan: Telah terbit PP No. 66 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia pada tanggal 29 Desember 2023. Selanjutnya pemerintah akan menutup perjanjian pinjaman sesuai dengan PP 66 Tahun 2023.

No	No SLA	Nilai PMN
1	AMA-416/RDI-265/DSMI/2023	172.697.572.956,00
2	AMA-417/RDI-302/DSMI/2023	125.792.754.280,00
3	AMA-418/RDI-330/DSMI/2023	743.663.231.984,00
4	RDI-414/EKS-RDI-297/DSMI/2023	57.827.896.629,33
5	RDI-406/EKS-RDI-213/DSMI/2023	44.211.950.111,73
6	RDI-419/EKS-RDI-006/DSMI/2023	16.652.927.396,29
7	RDI-420/EKS-RDI-299/DSMI/2023	64.870.305.070,00
8	RDI-421/EKS-RDI-371/DSMI/2023	192.202.716.631,37
9	SLA-1294/EKS-SLA-181/DSMI/2023	12.399.153.916,32
10	RDI-413/EKS-RDI-405/DSMI/2023	94.611.136.440,10
11	RDI-407/EKS-RDI-218/DSMI/2023	103.298.767.768,45
12	RDI-408/EKS-RDI-335/DSMI/2023	121.617.650.839,23
13	RDI-409/EKS-RDI-344/DSMI/2023	126.628.787.030,56
14	RDI-410/EKS-RDI-402/DSMI/2023	3.608.566.452,72
No	**No SLA**	**Nilai PMN**
15	RDI-411/EKS-RDI-403/DSMI/2023	3.599.777.230,35
16	RDI-412/EKS-RDI-404/DSMI/2023	56.100.371.499,31
17	RDI-415/EKS-RDI-401/DSMI/2023	5.649.740.891,81
18	SLA-1295/EKS-SLA-1291/DSMI/2023	9.616.106.815,99
Jumlah		**1.955.049.413.942**

2) Holding Industri Pertahanan: Telah terbit PP No. 63 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri pada tanggal 27 Desember 2023. Selanjutnya pemerintah akan menutup perjanjian pinjaman sesuai dengan PP 63 Tahun 2023.

No	No SLA	Nilai PMN

1	AMA-1296/SLA-716/DSMI/2023	Rp32.064.008.197,40
2	SLA-1305/EKS-SLA-461/DSMI/2023	Rp6.575.002.748,00
3	SLA-1306/EKS-SLA-183/DSMI/2023	Rp95.002.251.024,00
4	RDI-423/EKS-RDI-172/DSMI/2023	Rp55.864.508.502,00
5	RDI-422/EKS-RDI-173/DSMI/2023	Rp39.922.362.791,67
6	SLA-1298/EKS-SLA-1275/DSMI/2023	Rp5.166.323.075,00
7	SLA-1299/EKS-SLA-1279/DSMI/2023	Rp3.187.548.214,06
8	SLA-1302/EKS-SLA-1284/DSMI/2023	Rp6.363.043.021,92
9	SLA-1301/EKS-SLA-1285/DSMI/2023	Rp34.028.001.310,69
10	SLA-1303/EKS-SLA-1286/DSMI/2023	Rp52.497.682.167,36
11	SLA-1304/EKS-SLA-1287/DSMI/2023	Rp82.373.474.147,61
12	SLA-1300/EKS-SLA-1288/DSMI/2023	Rp39.975.389.649,12
13	SLA-1297/EKS-SlA-1289/DSMI/2023	Rp3.233.627.436,17
Jumlah		**Rp456.253.222.285,00**

d. Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN Tahun Anggaran 2023

1) PT PLN (Persero)

Terdapat 3 (tiga) kegiatan/proyek yang masih dalam masa penarikan dan mendapat pembiayaan dari DIPA BA BUN 999.04, yaitu:

No	Nama Proyek	Lokasi Proyek	Kegiatan	Keterangan
1.	SLA-1214/DP3/2008 (*Asahan No. 3 Hydroelectric Power Plant Construction Project*)	Provinsi Sumatera Utara	Konstruksi	*Closing Date:* 31 Desember 2023
2.	SLA-1265/DSMI/2016 (*Hululais Geothermal Power Plant Project (E/S)*)	Provinsi Bengkulu	*Engineering Services*	*Closing Date:* 14 Oktober 2025
3.	SLA-1290/DSMI/2022 (*Development of Pumped Storage Hydropower in the Java-Bali System Project)*	Provinsi Jawa Barat	Konstruksi dan Konsultasi	*Closing Date:* 15 September 2027

Pendanaan loan JICA IP-532 tahun 2006 (SLA-1214 tahun 2008) saat ini tidak mencukupi untuk menyelesaikan seluruh pembangunan PLTA Asahan No. 3. Kekurangan pendanaan disebabkan karena sudah tidak relevannya harga yang direncanakan pada tahun 2006 dengan kondisi saat ini, sehingga butuh tambahan pendanaan untuk penyelesaian proyek yang diperkirakan akan selesai pada Maret 2024. Akibat keterlambatan pembebasan lahan sehingga berimplikasi pada keterlambatan penyelesaian proyek dan perubahan total biaya konstruksi pembangunan, sehingga proyek memerlukan tambahan dana dan waktu untuk penyelesaian proyek. Tambahan dana berdasarkan Appraisal Mission dengan JICA yang tercantum dalam Minutes of Discussion tanggal 12-14 September 2022 sebesar JPY13.430.000.000 ekuivalen USD 99,48 juta (1 USD=JPY135). Menteri Keuangan melalui surat persetujuan nomor S-489/MK.05/2023 tanggal 7 Juni 2023 telah menetapkan persetujuan atas tambahan dana (additional loan) proyek PLTA Asahan No. 3 sebesar JPY13.430.000.000 dengan tenor 15 tahun (termasuk grace period 5 tahun). Saat ini Direktorat Pinjaman dan Hibah DJPPR sedang melakukan proses negosiasi *Loan*

Agreement dengan pihak lender JICA. Selanjutnya Direktorat SMI akan memproses dokumen SLA setelah dokumen LA disepakati.

Untuk SLA-1265 tahun 2016 yang berasal dari pinjaman JICA IP-572 merupakan pembiayaan kegiatan engineering services kegiatan/proyek PLTP Hululais baik untuk kegiatan konsultasi perencanaan maupun konsultasi pelaksanaan konstruksi. Untuk kegiatan konstruksi PLTP Hululais rencana akan dibiayai dari pinjaman JICA, namun saat ini belum ada kesepakatan dengan lender JICA terkait pencantuman TKDN pada dokumen tender (lelang) untuk pekerjaan konstruksi PLTP Hululais.

Terdapat isu terkait pembiayaan dengan skema *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) yaitu terkait pembiayaan proyek Development of Pumped Storage Hydropower in the Java-Bali System ('Proyek UCPS') yang memiliki kapasitas 1040 MW dengan original lenders IBRD dan AIIB. Adanya ketentuan dalam Pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah (PP) 10 Tahun 2011 menjadi kendala pada loan tambahan baru, mengingat telah dilakukan tanda tangan kontrak atas pekerjaan berdasarkan pendanaan loan sebelumnya. Biro Hukum Kementerian Keuangan telah menyampaikan tanggapan atas analisa hukum atas pendanaan proyek UCPS dalam kaitannya dengan PP 10 Tahun 2011 yang disampaikan Direktorat Sistem Manajemen Investasi DJPb. Adapun tanggapan terhadap permasalah kelanjutan pendanaan atas kontrak proyek UCPS, diperlukan langkah penyesuaian dalam bentuk side agreement yang ditandatangani oleh para pihak terkait, yakni:

- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, World Bank, dan AIIB selaku para pihak yang menandatangani *Loan Agreement* (LA);
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan PT PLN selaku para pihak yang menandatangani *Subsidiary Loan Agreement*; dan
- PT PLN dan vendor selaku para pihak yang menandatangani Kontrak Proyek UCPS.

Dengan demikian, diharapkan pembiayaan proyek UCPS dapat menggunakan sumber dana dari loan tambahan baru yakni LA 9278/2021 dan LA L0512A/2022. Progres s.d. saat ini yaitu PT PLN sudah menyampaikan draft side letter kepada pihak lender dan DJPPR.

2) PT SMI

Terdapat 6 perjanjian penerusan pinjaman kepada PT SMI dalam masa penarikan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor SLA	Nomor LA	Tujuan Pinjaman	Lender	Plafon Pinjaman (USD)
1.	SLA-1268/DSMI/2017	8715-ID	Pembiayaan Indonesia Infrastructure Finance Facility	IBRD	200.000.000
2.	SLA-1269/DSMI/2020	3840-INO	Pembiayaan Laveraging Private Infrastructure Investment Project	ADB	50.000.000
3.	SLA-1270/DSMI/2020	9009-ID	Pembiayaan eksplorasi panas bumi	World Bank	100.000.000
4.	SLA-1271/DSMI/2020	TF0B0306		World Bank (CTF)	40.000.000
5.	SLA-1272/DSMI/2021	TF0B3799		World Bank (GCF)	7.500.000
6.	SLA-1292/DSMI/2022	4172-INO	Pembiayaan SIO-GFF	ADB	150.000.000

Dari keenam SLA dimaksud, penerusan pinjaman untuk pembiayaan eksplorasi panas bumi belum dilakukan penarikan disebabkan beberapa faktor yakni belum adanya kesepakatan terkait tarif jual listrik ke PT PLN (Persero) (PPA) dan terbatasnya sisa masa eksplorasi yang dimiliki pengembang PLTP.

3) PT Pertamina

Sampai dengan 31 Desember 2023, terdapat 1 (satu) kegiatan/proyek pada PT Pertamina yang masih dalam masa penarikan dan mendapat pembiayaan dari DIPA BA BUN 999.04, yaitu SLA-1242/DSMI/2011, Proyek Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Lumut Balai**.** Proyek tersebut bertujuan Meningkatkan kapasitas pasokan energi listrik sistem Sumatera. Profil penerusan pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

Kategori	Uraian
Loan Agreement	JICA IP-557 Tanggal 29 Maret 2011
SLA	1242/DSMI/2011 Tanggal 20 Oktober 2011
Jumlah Pinjaman	JPY 26.966.000.000
Tingkat Bunga Tranch I (Plafon JPY 25.834.000.000)	0,09% s.d. 0,3% per tahun
Tingkat Bunga Tranch II (Plafon JPY 1.132.000.000)	0,003% s.d. 0,01%per tahun
vClosing Date	31 Desember 2026 (amandemen ke-4, diperpanjang dari sebelumnya 25 Oktober 2023)
Jangka waktu	40 tahun termasuk masa tenggang 10 tahun sejak tanggal LA aktif

Pada tanggal 28 November 2023, telah terbit Surat Menteri Keuangan No. S-103/PMK.05/2023 tentang Perubahan PPLN No. SLA-1242/DSMI/2011 tanggal 20 Oktober 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Side Letter No. S-63/MK.05/2021 tanggal 6 Agustus 2021 antara Pemerintah RI dan PT Pertamina (Persero) (“Amandemen Keempat”). Berdasarkan amandemen tersebut, tanggal terakhir penarikan pinjaman penerusan diperpanjang dari 25 Oktober 2023 menjadi 31 Desember 2026.

D.3.6. BA 999.05

1. Kebijakan Penyaluran Transfer ke Daerah TA 2023

Pada tahun 2023, terdapat kebijakan pengalihan penyaluran transfer ke Daerah dari DJPK kepada DJPb. Sesuai dengan beberapa PMK terkait kebijakan pengelolaan Dana Transfer, KPA Pengelolaan Dana Transfer adalah para Eselon II di unit teknis DJPK, sedangkan KPA Penyalur Transfer Ke Daerah adalah KPPN, yang memiliki 3 (Tiga) Satuan Kerja yaitu KPA Penyalur Dana Transfer Umum, KPA Penyalur Dana Transfer Khusus, dan KPA Penyalur Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Yogyakarta. Oleh karena itu selaku UAKPA BUN Penyalur TKD TA 2023, KPPN menyusun 3 (Tiga) Laporan Keuangan untuk Periode Semester I TA 2023, Triwulan III TA 2023, dan Audited – Audited TA 2023.

Dengan berubahnya entitas akuntansi dan pelaporan keuangan pada KPPN, maka dilakukan Likuidasi pada Satuan Kerja lama yaitu KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Selanjutnya atas hak dan kewajiban pada satker sebelumnya, dilakukan mutasi ke satker baru KPPN selaku KPA Penyalur Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Rincian Piutang sesuai dengan LK TA 2022 Audited adalah sebagai berikut:

a. Piutang DAK Nonfisik sebesar Rp235.474.854.444,00.
b. Piutang Dana Desa sebesar Rp6.663.568.678,00.

Selain itu, dengan beralihnya KPA Penyalur TKD seluruh jenis TKD dari DJPK ke KPPN, maka dilakukan pencatatan seluruh hak dan kewajiban atas pengelolaan TKD. Sehingga dilakukan serah terima catatan Utang dan Piutang yang dibuktikan dengan dokumen Berita Acara Serah Terima Utang dan/atau Piutang antara Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer dengan Direktur Pelaksanaan Anggaran selaku Koordinator KPA Penyalur Transfer Ke Daerah sesuai dengan BAST sebagaimana berikut:

a. BAST nomor ND-367/PK.4/2023 tanggal 10 Juli 2023 perihal Serah Terima Utang dan/atau Piutang DAK Nonfisik.
b. BAST nomor BA-3/PK.4/2023 tanggal 13 Juli 2203 perihal Serah Terima Utang dan/atau Piutang Dana Bagi Hasil (DBH).
c. BAST nomor ND-70/PK.7/2023 tanggal 12 Agustus 2023 Perihal Serah Terima Piutang Dana Keistimewaan Yogyakarta.

2. Perubahan Kebijakan Pengelolaan Hibah Kepada Daerah TA 2023

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 131 ayat (3) mengatur bahwa Hibah Kepada Daerah ditetapkan merupakan bagian dari Dana Alokasi Khusus yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Implikasi dari amanat UU HKPD tersebut, maka tata kelola hibah kepada daerah disesuaikan dengan siklus pengalokasian Transfer ke Daerah. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian peraturan pelaksanaan dan proses bisnis Hibah kepada Daerah, antara lain mencakup:'

a. Revisi PMK tentang Pengelolaan Hibah Kepada Daerah
b. Pengalihan Bagian Anggaran (BA) 999.02 (Pengelolaan Hibah) ke BA 999.05 (Transfer Ke Daerah).
c. Perubahan Klasifikasi anggaran,
d. Penentuan PPA dan KPA;
e. Mekanisme pelaporan dan Akuntansi

Adapun sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan dinamika yang ada, Entitas Akuntansi Satuan Kerja (Satker) 985261 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Hibah Rupiah Murni) Pengelolaan Hibah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri dan Satker 985251 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Pengelolaan Hibah yang bersumber dari Hibah dan/atau Pinjaman Luar Negeri yang menjadi bagian BA BUN 999.02 (Pengelolaan Hibah), pada tahun 2023 akan digabung menjadi satu menjadi bagian dari BA BUN 999.05 Transfer Ke Daerah. Sesuai dengan notulensi rapat persiapan penyaluran Dana Hibah kepada Daerah TA 2023 melalui KPPN, penyaluran dan penatausahaan akuntansi Hibah Kepada Daerah dilakukan melalui KPPN Jakarta I. Sehingga dilakukan penggabungan Entitas Akuntansi Satker 985261 dan satker 985251 yang diampu oleh DJPK menjadi Satker yang diampu oleh KPPN Jakarta I.

Sesuai dengan PMK Nomor 47/PMK.05/2017 tetang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, terdapat pengaturan serah terima Hak dan Kewajiban

melalui berita serah terima sehingga Neraca terakhir dari Satker yg dilikuidasi menjadi Nihil. Adapun Neraca Tahun 2022 satker 985251 tercatat NIHIL sehingga tidak ada Hak dan Kewajiban yang hasus diserahterimakan.

3. Penyelesaian Piutang TKD

Sampai dengan 31 Desember 2023, terdapat penyelesaian atas Piutang TKD pada Pemda dan Desa yang diselesaikan melalui Pemotongan atas Penyaluran TKD TA 2023 dan Koreksi. Penyelesaian piutang tersebut antara lain:

a. Dana Bagi Hasil sebesar Rp5.960.825.244.000;
b. DAK Nonfisik sebesar Rp2.057.843.470.325;
c. Insentif Fiskal sebesar Rp47.274.190.776;
d. Dana Desa sebesar Rp4.474.749.401.

Selain itu, terdapat Setoran yang berasal dari Tahun Anggaran Yang Lalu sehingga diakui sebagai Pendapatan Bukan Pajak yang berasal dari Setoran atas Transfer Ke Daerah dan Hibah ke Daerah yang di kembalikan ke Kas Negara dengan bukti NTPN dengan total setoran sebesar Rp71.169.690.935. Setoran tersebut merupakan penyaluran transfer TAYL yang tidak digunakan atau sisa dana yang disetorakan pada tahun anggaran berjalan.

4. Penyelesaian Utang TKD

Sampai dengan 31 Desember 2023, terdapat penyelesaian atas Utang TKD pada Pemda dan Desa yang diselesaikan melalui Penyaluran TKD Semester II TA 2023. Penyelesaian Utang tersebut adalah Utang Dana Bagi Hasil Rp46.909.526.810.000.

5. Program Percepatan Penanganan Stunting

a. DAK Fisik

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi, terdapat 3 (tiga) jenis TKDD yang diamanatkan untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi, yaitu (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, (2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, dan (3) Dana Desa.

Dukungan DAK Fisik untuk pencegahan stunting pada Tahun Anggaran 2023 terdapat pada Bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi. Selain itu, program penanggulangan stunting juga diwujudkan dengan konvergensi sumber-sumber pendanaan tersebut pada lokasi prioritasnya. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, disebutkan bahwa terdapat 249 (dua ratus empat puluh sembilan) daerah di 12 provinsi prioritas yang menjadi Lokus Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi.

1) DAK Fisik Penurunan Stunting

DAK Fisik berdasarkan PMK Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi terdiri atas DAK Fisik untuk Bidang Kesehatan, Bidang Air

Minum, dan Bidang Sanitasi. Adapun gambaran umum atas penyaluran DAK Fisik dalam rangka penurunan stunting sebagai berikut:

Rekap Alokasi dan Realisasi Penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2023
(dalam rupiah)

No.	Program/ Kegiatan/Output	Jumlah Daerah	Anggaran	Realisasi Penyaluran	%
1	Air Minum	229	1.922.314.577.000	1.802.690.022.800	93,78%
2	Kesehatan dan Keluarga Berencana yang mendukung stunting	246	2.448.984.478.000	2.189.033.985.767	89,39%
3	Sanitasi	237	1.542.187.349.000	1.524.891.647.477	98,88%
Grand Total		**249**	**5.913.486.404.000**	**5.516.615.656.044**	**93,29%**

2) DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana

DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan kesehatan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menu dan rincian kegiatan dalam DAK Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana yang mendukung penurunan stunting antara lain:

Subbidang Keluarga Berencana
Menu Percepatan Penurunan Stunting
Pembangunan/Rehab/Kelengkapan Balai Penyuluhan KB
Pengadaan Kendaraan Air Antar Jemput Calon Akseptor
Pengadaan Kendaraan Roda Dua Antar Jemput Calon Akseptor
Pengadaan Kendaraan Roda Empat atau lebih Antar Jemput Calon Akseptor
Menu Sarana Prasarana Pelayanan KB
Pembangunan/Rehab/Kelengkapan Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi
Pengadaan Implan Removal Kit
Pengadaan IUD Kit
Pengadaan Laparoskopi dengan kamera dan monitor
Pengadaan Minilaparotomi/ Tubectomi set
Pengadaan Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) Kit
Subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting
Menu Penguatan Kapasitas RS Mampu PONEK
Alat Kesehatan untuk RS Mampu PONEK
Menu Penguatan Layanan Maternal Neonatal di Puskesmas
Alat kegawatdaruratan maternal neonatal
USG 2 Dimensi
Menu Penyediaan Alat Surveillans Gizi
Alat antropometri
Menu Unit Transfusi Darah

Alat UTD
Sarana (Pembangunan/Renovasi)
UTD Mobile

Tahun 2023, data penyaluran untuk DAK Fisik Kesehatan dan Keluarga Berencana sudah mencapai 89,39% atau dari pagu Rp2.448,9 Milyar telah tersalur Rp1.189 Milyar dengan 246 daerah lokasi yang disalurkan.

3) DAK Fisik Bidang Sanitasi

DAK Fisik Bidang Sanitasi adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dalam rangka mendukung terwujudnya layanan sanitasi yang berkelanjutan menuju target TPB bidang sanitasi serta pemenuhan SPM air limbah melalui dukungan Pemerintah Daerah dalam peningkatan cakupan layanan sanitasi. Pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan sistem sanitasi dalam Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK). Pelaksanaan DAK Fisik Subbidang Sanitasi dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S), Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), dan pembangunan tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, resycle (TPS3R).

Untuk Tahun 2023, data penyaluran untuk DAK Fisik Bidang Sanitasi yang mendukung penanganan stunting telah mencapai 98,88% atau dari pagu Rp1.542,2 Milyar telah tersalur Rp1.524,8 Milyar dengan 237 daerah lokasi yang disalurkan.

4) DAK Fisik Bidang Air Minum

DAK Fisik Bidang Air Minum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dalam rangka mewujudkan pemenuhan 100% akses layanan air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan sesuai target Sustainable Development Goals (SDGs) atau TPB Goal ke 6.1.1 dan untuk mewujudkan pemenuhan SPM serta untuk mendukung program prioritas nasional, dengan komitmen dan upaya pemerintah daerah. Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Air Minum berupa Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Komunal berupa Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi / Penampungan Air Hujan (PAH) / Penangkap Mata Air (PMA), Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan berupa Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Broncaptering/Sumur Dalam Terlindungi, Pembangunan Transmisi Air Curah untuk SPAM Regional berupa Pengembangan Jaringan Distribusi Utama (JDU), Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan berupa Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/ Broncaptering, dan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan berupa Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR).

Untuk Tahun 2023, data penyaluran untuk DAK Fisik Bidang Air Minum yang mendukung penanganan stunting sudah mencapai 93,78% atau dari pagu Rp1.922,3 Milyar telah tersalur Rp1.802,7 Milyar dengan 229 daerah lokasi yang disalurkan.

b. DAK Non Fisik

Dukungan Percepatan Pencegahan Stunting melalui DAK Nonfisik Tahun 2023 meliputi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), dan Bantuan Operasional Penyelengaaran Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD). Alokasi Untuk Dukungan Stunting Pada Tahun 2023 mengalami peningkatan signifikan antara lain karena pada dana BOK, sudah tidak terdapat menu khusus stunting, sehingga untuk tagging konvergensi menyebar ke hampir sebagian besar menu kegiatan BOK. Selain itu, pada tahun 2023, jenis DAK Nonfisik BOP PAUD kembali ditagging untuk penurunan stunting sebesar 9% dari Total Alokasi dan Realisasi BOP PAUD Reguler. Secara umum total penyaluran untuk ketiga DAK Nonfisik terkait stunting adalah sebesar 97,7% dengan realisasi penyerapan per 31 Desember 2023 berdasarkan laporan tahap I TA 2023 yang disampaikan daerah melalui aplikasi Aladin, DJPK adalah sebesar 14,9%. Realisasi Penyerapan BOP PAUD berdasarkan data penggunaan yang telah dilaporkan ke BOS Salur sampai dengan tahap I untuk penyaluran tahap 2 Gelombang 2 BOP PAUD 2023. Gambaran tentang alokasi dan realisasi DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2023 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut (dalam juta rupiah):

Jenis Dana	Jumlah Daerah	Alokasi 2023	Penyaluran 2023	% Salur	Penyerapan 2023	% Serap/ Alokasi
BOK (Stunting)	545	6.748.857	6.556.208	97,1%	661.670	9,8%
BOKB (Stunting)	509	1.777.290	1.772.398	99,7%	639.180	36,0%
DKPP (Stunting)	337	95.791	92.636	96,7%	39.299	41,0%
BOP PAUD (Stunting)	509	357.442	355.140	99,4%	152.939	42,8%
Total	**546**	**8.979.379**	**8.776.383**	**97,7%**	**1.493.088**	**16,6%**

Data per 31 Desember 2023

1) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan upaya pemerintah pusat dalam membantu pemerintah daerah untuk mencapai target nasional di bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawab daerah. BOK adalah bantuan dana dari Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Usaha Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif sesuai SPM menuju target SDGs atau TPB. Kegiatan yang didanai BOK meliputi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu (1) upaya kesehatan, (2) penyelenggaraan manajemen kesehatan, serta (3) upaya pendukung/penunjang untuk keberhasilannya. Upaya kesehatan wajib yang dibiayai BOK diantaranya upaya kesehatan promotif dan preventif yang meliputi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), imunisasi, perbaikan gizi, promosi kesehatan, pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan dan upaya kesehatan lainnya. Terkait kegiatan penunjang, BOK juga bisa membiayai kegiatan diantaranya meliputi kegiatan Poskesdes dan Posyandu, pengelolaan administrasi BOK, rapat koordinasi lintas sektor, pendampingan musyawarah masyarakat desa, orientasi kader kesehatan, penyuluhan kesehatan dan studi banding antar Puskesmas.

Tahun 2023, penyaluran BOK sudah mencapai 97,1% artinya hampir seluruh daerah sudah mendapatkan penyaluran BOK Stunting, dengan penyerapan per 31 Desember 2023 sebesar Rp661,6 Miliar atau sebesar 9,8% dari alokasi.

2) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)

Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian prioritas nasional yaitu sasaran Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
Tujuan dari BOKB adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di daerah untuk meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan, mendukung daerah dalam pencapaian SPM kesehatan dan pencapaian akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan pemerataan pelayanan KB dan Kespro; mempercepat penurunan angka kematian ibu (AKI) dan stunting melalui penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dan penguatan pengasuhan 1000 HPK.

Sampai akhir 2023, sudah tersalurkan sebesar Rp1.772,4 Miliar atau sebesar 99,7% dari alokasi anggaran ke Kabupaten/Kota untuk DAK Non Fisik Stunting-BOKB dengan penyerapan per 31 Desember 2023 berdasarkan laporan Tahap I TA 2023 yang dilaporkan daerah melalui aplikasi Aladin yakni sebesar Rp639,18 Miliar atau 36,1% dari alokasi.

3) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP)

Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) adalah dana yang ditujukan untuk mendukung keberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri dengan membantu pemerintah daerah dalam menyukseskan program pekarangan pangan lestari. Dukungan program percepatan pencegahan stunting melalui DKKP ini dilakukan dalam bentuk kegiatan pekarangan pangan lestari yang dapat meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga sesuai kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta untuk jangka panjang serta dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar.

Pada tahun 2023, DKPP terkait stunting telah disalurkan sebesar 96,71% dari alokasi sebesar Rp95,79 Miliar dengan penyerapan per 31 Desember 2023 sebesar Rp39,30 Miliar.

4) BOP PAUD

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) adalah dana yang ditujukan untuk memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan secara bertahap SPM pendidikan dan mendukung pelaksanaan satu tahun pra sekolah. Dukungan program percepatan pencegahan stunting melalui BOP PAUD ini dilakukan dalam bentuk kegiatan ‘pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain’ dengan sub kegiatan ‘pembiayaan diskusi perkembangan anak’, dan kegiatan ‘penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan

kebersihan' yang meliputi sub kegiatan 'penyediaan alat-alat deteksi dini tumbuh kembang' dan 'penyediaan makanan tambahan.

Pada tahun 2023, BOP terkait stunting telah disalurkan sebesar 99,4% dari alokasi sebesar Rp357,44 Miliar (9% dari alokasi BOP PAUD Reguler tahun 2023) dengan penyerapan per 31 Desember 2023 sebesar Rp152,94 Miliar.

c. Dana Desa

Dukungan Dana Desa untuk pencegahan stunting pada Tahun Anggaran 2023 dari 434 daerah penerima Dana Desa dialokasikan sebesar Rp6.190,51 miliar atau 9,10% dari pagu Dana Desa dan terealisasi sebesar Rp5,977,06 miliar atau (96,55%). Untuk mempercepat penurunan stunting, mulai tahun 2022 seluruh kab/kota menjadi lokus percepatan penurunan stunting. Pada Tahun 2023 Lokus prioritas diarahkan pada 12 Provinsi Prioritas dengan pravelensi jumlah balita stunting tertinggi dan terbanyak yaitu Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Lokasi fokus sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan dalam memprioritaskan lokasi pelaksanaan program/kegiatannya. Kriteria pemilihan lokasi fokus ialah:

1) Jumlah balita stunting;
2) Prevalensi stunting;
3) Tingkat kemiskinan;
4) Daerah dengan komitmen dan praktik baik;
5) Pemerataan lokus di tiap provinsi.

Kegiatan penanganan stunting melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat desa terdiri atas:

1) Pelatihan Pengolahan makanan bergizi bagi guru PAUD dan orangtua siswa;
2) Pendayagunaan Lahan Desa dalam rangka Penyediaan Makanan Sehat dan Bergizi untuk Ibu Hamil Balita dan Anak Sekolah;
3) Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah.

Sedangkan Kegiatan penanganan stunting melalui pembangunan desa antara lain terdiri dari :

1) Pengelolaan Advokasi Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa melalui Aplikasi Digital (e-HDW);
2) Biaya Operasional KPM Stunting;
3) Pembiayaan Pelatihan Guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting;
4) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Pos Pembinaan Terpadu/Penanganan Stunting;
5) Tindakan Promotif dan Preventif untuk Pencegahan Stunting melalui Rumah Desa Sehat;
6) Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi.

Adapun penggunaan Dana Desa dalam mendukung penurunan dan pencegahan stunting melalui tindakan promotif dan preventif seperti;

1) pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil;

2) penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman;
3) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
4) pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi, thermometer, dan peralatan kesehatan dasar lain) dan alat peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu;
5) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran stunting;
6) konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran stunting;
7) pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, pendidik pada Pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa; dan
8) kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.dalam Musyawarah Desa.

D.3.7. BA 999.07

PENGUNGKAPAN PENTING PER KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

1. Kementerian Perhubungan

a. Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

1) Pagu Anggaran Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/Public Service Obligation (PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2023 adalah :
   a) Pagu Awal sesuai DIPA Nomor: SP.DIPA-999.07.1.985120/2023 tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp 2.395.825.599.000.
2) Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/Public Service Obligation (PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2021 tanggal Nomor HK. 201/I/3/DJPL/2023 dan TH.01.02-02/KNP/2023 tanggal 2 Januari 2023;
3) Surat Perintah Membayar selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Nilai SP2D
1.	00001T/985120/2023	12 April 2023	168.256.680.359
2.	00002T/985120/2023	12 April 2023	160.263.702.459
3.	00003T/985120/2023	22 Mei 2023	169.486.067.526
4.	00004T/985120/2023	11 Juli 2023	183.945.831.232
5.	00005T/985120/2023	25 Juli 2023	106.502.883.345
6.	00006T/985120/2023	25 Juli 2023	152.648.524.305
7.	00007T/985120/2023	01 September 2023	154.235.703.065
8.	00008T/985120/2023	27 September 2023	178.067.821.388
9.	00009T/985120/2023	16 Oktober 2023	171.358.695.886
10.	00010T/985120/2023	14 November 2023	111.051.291.344
11.	00011T/985120/2023	14 November 2023	169.051.121.003
12.	00012T/985120/2023	29 November 2023	179.355.238.070
13.	00013T/985120/2023	22 Desember 2023	207.892.688.771
14.	00014T/985120/2023	22 Desember 2023	95.265.596.383
15.	00015T/985120/2023	28 Desember 2023	120.979.750.456
16.	00016T/985120/2023	28 Desember 2023	67.472.406.559
	Total		2.395.825.002.151

4) Pemerintah mengalokasikan dana APBN Public Service Obligation/PSO pada tahun 2023 sebesar Rp. 2.395.825.599.000,- dengan rincian pengeluaran berdasarkan Berita Acara Verifikasi sebagai berikut:
   a) Berita Acara Verifikasi Administrasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Bulan Januari Tahun Anggaran 2023 Nomor: 01/BA-VER/PSO/II/2023 tanggal 24 Februari 2023, dapat dijelaskan bahwa untuk pembayaran bulan Januari tahun 2023 berdasarkan data yang diperoleh dari analisa realisasi volume penumpang kelas ekonomi sebanyak 389.013 penumpang, berdasarkan realisasi volume penumpang kelas ekonomi yang disajikan di atas baru dapat dibayarkan ke PT PELNI (Persero) sebesar 80%, sehingga realisasi laporan keuangan PSO yang dapat dibayarkan ke PT PELNI (Persero) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00001A tanggal 12 April 2023 Dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00001A tanggal 12 April 2023, dan SP2D Nomor 230191303006121 Tanggal 13 April 2023 sebesar Rp 168.256.680.359,-.
   b) Berita Acara Verifikasi Administrasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Bulan Februari Tahun Anggaran 2023 Nomor: 02/BA-VER/PSO/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, dapat dijelaskan bahwa untuk pembayaran bulan Februari tahun 2023 berdasarkan data yang diperoleh dari analisa realisasi volume penumpang kelas ekonomi sebanyak 236.312 penumpang, berdasarkan realisasi volume penumpang kelas ekonomi yang disajikan di atas baru dapat dibayarkan ke PT PELNI (Persero) sebesar 80%, sehingga realisasi laporan keuangan PSO yang dapat dibayarkan ke PT PELNI (Persero) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00002A tanggal 12 April 2023 Dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00002A tanggal 12 April 2023, dan SP2D Nomor 230191303006169 Tanggal 14 April 2023 sebesar Rp 160.263.702.459,-.
   c) Berita Acara Verifikasi Administrasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Bulan Maret Tahun Anggaran 2023 Nomor: 03/BA-VER/PSO/V/2023

tanggal 04 Mei 2023, dapat dijelaskan bahwa untuk pembayaran bulan Maret tahun 2023 berdasarkan data yang diperoleh dari analisa realisasi volume penumpang kelas ekonomi sebanyak 229712 penumpang, berdasarkan realisasi volume penumpang kelas ekonomi yang disajikan di atas baru dapat dibayarkan ke PT PELNI (Persero) sebesar 80%, sehingga realisasi laporan keuangan PSO yang dapat dibayarkan ke PT PELNI (Persero) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00003A tanggal 22 Mei 2023 Dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00003A tanggal 22 Mei 2023, dan SP2D Nomor 230191303008413 Tanggal 25 Mei 2023 sebesar Rp 169.486.067.526,-.

d) Berita Acara Verifikasi Administrasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Bulan April Tahun Anggaran 2023 Nomor: 04/BA-VER/PSO/V/2023 tanggal 22 Mei 2023, dapat dijelaskan bahwa untuk pembayaran bulan April tahun 2023 berdasarkan data yang diperoleh dari analisa realisasi volume penumpang kelas ekonomi sebanyak 415.945 penumpang, berdasarkan realisasi volume penumpang kelas ekonomi yang disajikan di atas baru dapat dibayarkan ke PT PELNI (Persero) sebesar 80%, sehingga realisasi laporan keuangan PSO yang dapat dibayarkan ke PT PELNI (Persero) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00004A tanggal 11 Juli 2023 Dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00004A tanggal 11 Juli 2023, dan SP2D Nomor 230191303012522 Tanggal 13 Juli 2023 sebesar Rp 183.945.831.232,-.

e) Berita Acara Verifikasi Administrasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Triwulan I (Januari, Februari dan Maret) Tahun Anggaran 2023 Nomor: 05/BA-VER-TRWI/PSO/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023, dapat dijelaskan bahwa untuk pembayaran Triwulan I (Januari, Februari dan Maret) tahun 2023 dengan total tagihan sebesar Rp. 124.501.612.587,- dan terdapat koreksi sebesar Rp.17.998.729.242,- sehingga yang dapat dibayarkan ke PT. PELNI (Persero) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00005A tanggal 25 Juli 2023 Dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00005A tanggal 25 Juli 2023, dan SP2D Nomor 230191303013851 Tanggal 27 Juli 2023 sebesar Rp 106.502.883.345,-.

f) Berita Acara Verifikasi Administrasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Bulan Mei Tahun Anggaran 2023 Nomor: 06/BA-VER/PSO/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023, dapat dijelaskan bahwa untuk pembayaran bulan Mei tahun 2023 berdasarkan data yang diperoleh dari analisa realisasi volume penumpang kelas ekonomi sebanyak 457.091 penumpang, berdasarkan realisasi volume penumpang kelas ekonomi yang disajikan di atas baru dapat dibayarkan ke PT PELNI (Persero) sebesar 80%, sehingga realisasi laporan keuangan PSO yang dapat dibayarkan ke PT PELNI (Persero) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00006A tanggal 25 Juli 2023 Dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00006A tanggal 25 Juli 2023, dan SP2D Nomor 230191303013852 Tanggal 27 Juli 2023 sebesar Rp 152.648.524.305,-.

g) Berita Acara Verifikasi Administrasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Bulan Juni Tahun Anggaran 2023 Nomor: 07/BA-VER/PSO/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023, dapat dijelaskan bahwa untuk pembayaran bulan Juni tahun 2023 berdasarkan data yang diperoleh dari analisa realisasi volume penumpang kelas ekonomi sebanyak 420.191 penumpang, berdasarkan realisasi volume penumpang kelas ekonomi yang disajikan di atas baru dapat dibayarkan ke PT PELNI (Persero) sebesar 80%, sehingga realisasi laporan keuangan PSO yang dapat dibayarkan ke PT PELNI (Persero) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00007A tanggal 01 September 2023 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00007A tanggal 01 September 2023, dan SP2D Nomor 230191303017336 Tanggal 05 September 2023 sebesar Rp 154.235.703.065,-.

h) Berita Acara Verifikasi Administrasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Bulan Juli Tahun Anggaran 2023 Nomor: 08/BA-VER/PSO/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023, dapat dijelaskan bahwa untuk pembayaran bulan Juli tahun 2023 berdasarkan data yang diperoleh dari analisa realisasi volume penumpang kelas ekonomi sebanyak 485.575 penumpang, berdasarkan realisasi volume penumpang kelas ekonomi yang disajikan di atas baru dapat dibayarkan ke PT PELNI (Persero) sebesar 80%, sehingga realisasi laporan keuangan PSO yang dapat dibayarkan ke PT PELNI (Persero) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00008A tanggal 27 September 2023 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00008A tanggal 27 September 2023, dan SP2D Nomor 230191303019423 Tanggal 02 Oktober 2023 sebesar Rp 178.067.821.388,-.

i) Berita Acara Verifikasi Administrasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Bulan Agustus Tahun Anggaran 2023 Nomor: 09/BA-VER/PSO/IX/2023 tanggal 22 September 2023, dapat dijelaskan bahwa untuk pembayaran bulan Agustus tahun 2023 berdasarkan data yang diperoleh dari analisa realisasi volume penumpang kelas ekonomi sebanyak 325.340 penumpang, berdasarkan realisasi volume penumpang kelas ekonomi yang disajikan di atas baru dapat dibayarkan ke PT PELNI (Persero) sebesar 80%, sehingga realisasi laporan keuangan PSO yang dapat dibayarkan ke PT PELNI (Persero) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00009T tanggal 16 Oktober 2023 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00009T tanggal 16 Oktober 2023, dan SP2D Nomor 230191303021410 Tanggal 18 Oktober 2023 sebesar Rp 171.358.695.886,-.

j) Berita Acara Verifikasi Administrasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Triwulan II (April, Mei dan Juni) Tahun Anggaran 2023 Nomor: 10/BA-VERTRWII/PSO/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023, dapat dijelaskan bahwa untuk pembayaran Triwulan II (April, Mei dan Juni) tahun 2023 dengan total tagihan sebesar Rp122.707.514.651,- dan terdapat koreksi sebesar Rp. 11.656.223.309,- sehingga yang dapat dibayarkan ke PT. PELNI (Persero) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00010T tanggal 14 November 2023 dan Surat Perintah Membayar (SPM)

Nomor 00010T tanggal 14 November 2023, dan SP2D Nomor 230191303025132 Tanggal 21 November 2023 sebesar Rp 111.051.291.344,-.

k) Berita Acara Verifikasi Administrasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Bulan September Tahun Anggaran 2023 Nomor: 11/BA-VER/PSO/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023, dapat dijelaskan bahwa untuk pembayaran bulan September tahun 2023 berdasarkan data yang diperoleh dari analisa realisasi volume penumpang kelas ekonomi sebanyak 282.870 penumpang, berdasarkan realisasi volume penumpang kelas ekonomi yang disajikan di atas baru dapat dibayarkan ke PT PELNI (Persero) sebesar 80%, sehingga realisasi laporan keuangan PSO yang dapat dibayarkan ke PT PELNI (Persero) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00011T tanggal 14 November 2023 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00011T tanggal 14 November 2023, dan SP2D Nomor 230191303025133 Tanggal 21 November 2023 sebesar Rp 169.051.121.003,-

l) Berita Acara Verifikasi Administrasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Bulan Oktober Tahun Anggaran 2023 Nomor: 12/BA-VER/PSO/XI/2023 tanggal 15 November 2023, dapat dijelaskan bahwa untuk pembayaran bulan Oktober tahun 2023 berdasarkan data yang diperoleh dari analisa realisasi volume penumpang kelas ekonomi sebanyak 294.783 penumpang, berdasarkan realisasi volume penumpang kelas ekonomi yang disajikan di atas baru dapat dibayarkan ke PT PELNI (Persero) sebesar 80%, sehingga realisasi laporan keuangan PSO yang dapat dibayarkan ke PT PELNI (Persero) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00012T tanggal 29 November 2023 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00012T tanggal 29 November 2023, dan SP2D Nomor 230191303026891 Tanggal 06 Desember 2023 sebesar Rp 179.355.238.070,-.

m) Berita Acara Verifikasi Administrasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Bulan November Tahun Anggaran 2023 Nomor: 13/BA-VER/PSO/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023, dapat dijelaskan bahwa untuk pembayaran bulan November tahun 2023 berdasarkan data yang diperoleh dari analisa realisasi volume penumpang kelas ekonomi sebanyak 295.808 penumpang, berdasarkan realisasi volume penumpang kelas ekonomi yang disajikan di atas baru dapat dibayarkan ke PT PELNI (Persero) sebesar 90%, sehingga realisasi laporan keuangan PSO yang dapat dibayarkan ke PT PELNI (Persero) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00013T tanggal 22 Desember 2023 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00013T tanggal 22 Desember 2023, dan SP2D Nomor 230191303030395 Tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp 207.892.688.771,-.

n) Berita Acara Verifikasi Administrasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Triwulan III (Juli, Agustus dan September) Tahun Anggaran 2023 Nomor: 14/BA-VERTRWIII/PSO/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023, dapat dijelaskan bahwa untuk pembayaran Triwulan III (Juli, Agustus dan September) tahun 2023 dengan total

tagihan sebesar Rp.129.619.409.569,- dan terdapat koreksi sebesar Rp.34.362.813.185,- sehingga yang dapat dibayarkan ke PT. PELNI (Persero) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00014T tanggal 22 Desember 2023 Dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00014T tanggal 22 Desember 2023, dan SP2D Nomor 230191303030396 Tanggal 28 Desember 2023 sebesar Rp 95.256.596.383,-.

o) Berita Acara Verifikasi Administrasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Bulan Desember (Tanggal 1-13) Tahun Anggaran 2023 Nomor: 15/BA-VER/PSO/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023, dapat dijelaskan bahwa untuk pembayaran bulan Desember tahun 2023 berdasarkan data yang diperoleh dari analisa realisasi volume penumpang kelas ekonomi sebanyak ….. penumpang, berdasarkan realisasi volume penumpang kelas ekonomi yang disajikan di atas yang dapat dibayarkan ke PT PELNI (Persero) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00015T tanggal 28 Desember 2023 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00015T tanggal 8 Desember 2023, dan SP2D Nomor 230191303030450 Tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp120.979.750.456,-.

p) Berita Acara Verifikasi Administrasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Bulan Desember (Tanggal 1-13) Tahun Anggaran 2023 Nomor: 15/BA-VER/PSO/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023, dapat dijelaskan bahwa untuk pembayaran bulan Desember tahun 2023 berdasarkan data yang diperoleh dari analisa realisasi volume penumpang kelas ekonomi sebanyak ….. penumpang, berdasarkan realisasi volume penumpang kelas ekonomi yang disajikan di atas yang dapat dibayarkan ke PT PELNI (Persero) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00015T tanggal 28 Desember 2023 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00015T tanggal 8 Desember 2023, dan SP2D Nomor 230191303030450 Tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp120.979.750.456,-.

5) Perincian pembayaran atas tagihan PSO selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah Tagihan	Sisa Tagihan	Koreksi atas Tagihan	Jumlah yang Dibayarkan	Persen Pencairan	Sisa yang Belum Dibayarkan
1.	Januari	210.320.850.449			168.256.680.359	80%	0
2.	Februari	200.329.628.074			160.263.702.459	80%	0
3.	Maret	211.857.584.408			169.486.067.526	80%	0
4.	April	229.932.289.041			183.945.831.232	80%	0
5.	Triwulan I	0	124.501.612.587	17.998.729.242	106.502.883.345	20%	0
6.	Mei	190.810.655.382			152.648.524.305	80%	0
7.	Juni	192.794.628.832			154.235.703.065	80%	0
8.	Juli	222.584.776.734			178.067.821.388	80%	0
9.	Agustus	214.198.369.857			171.358.695.886	80%	0
10.	Triwulan II	0	122.707.514.651	11.656.223.309	111.051.291.344	20%	0
11.	September	211.313.901.254			169.051.121.003	80%	0
12.	Oktober	224.194.047.588			179.355.238.070	80%	44.838.809.518
13.	November	230.991.876.412			207.892.688.771	90%	23.099.187.641
14.	Triwulan III	0	129.619.409.569	34.362.813.185	95.256.96.383	20%	
	Desember (Tgl 1 -13)	438.860.275.119			120.979.750.456	Tgl 1-13	317.880.524.663
15.	Kurang Bayar TA. 2022	67.472.406.559,71			67.472.406.559		0
Total		2.845.661.289.709			2.395.825.002.151		385.818.521.822

6) Menindaklanjuti Uji Petik yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal III Kementerian Perhubungan terhadap Data Dukung Dokumen Verifikasi pada saat dilakukannya Reviu Laporan Keuangan Triwulan III (BA 999.07) PSO PT. PELNI (Persero) berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor KU.204/4/4/DJPL/2023 tanggal 22 Desember 2023 perihal Tindak Lanjut Atas Hasil Uji Petik pada Pelaksanaan Reviu LK Triwulan III PSO maka telah dilakukan koreksi sebesar Rp11.795.753.634,- pada sisa pembayaran bulan Juli yang tercatat pada Berita Acara Verifikasi Triwulan III (Juli, Agustus, September) Nomor: 14/BA-VER-TRWIII/PSO/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023.
7) Belum dilakukannya pembayaran atas sisa tagihan untuk Bulan Oktober, November dan Desember tanggal 14 – 31 (Triwulan IV) TA. 2023 dari hasil verifikasi oleh konsultan pengawas dengan PT. Pelni (Persero) senilai Rp385.818.521.822,-, sehingga nilai tersebut disajikan sebagai utang subsidi diestimasi (214112) pada Laporan Keuangan Unaudited. Dengan demikian, Hasil pemeriksaan oleh BPK RI terhadap total belanja maupun beban subsidi akan menjadi acuan satker dalam menyajikan akun Belanja Subsidi Yang Masih Harus Dibayar (214211) pada Laporan Keuangan Audited.
8) Sisa Tagihan untuk bulan Oktober, November dan Desember (tanggal 14-31) adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah Tagihan	Jumlah yang Dibayarkan	Sisa Tagihan
10.	Oktober	224.194.047.588	179.355.238.070	44.838.809.518
11.	November	230.991.876.412	207.892.688.771	23.099.187.641
12.	Desember	438.860.275.119	120.979.750.456	317.880.524.663
Total		894.046.199.119	508.227.677.297	385.818.521.822

9) Terdapat Addendum Kontrak 1 terkait perubahan:
   a) Target voyage semula 622 voyage menjadi 629 voyage;
   b) Nilai penyelenggaraan subsidi TA. 2023 yang semula sebesar Rp.2.395.825.599.000,- menjadi sebesar Rp.2.328.353.192.000,-. Untuk mengakomodir pembayaran Kurang Bayar TA. 2022 sebesar Rp.67.472.407.000,-.

b. Direktorat Jenderal Perkeretaapian

1) Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2023 ini merupakan dana APBN (BA BUN 999.07) yang merupakan penggunaan untuk subsidi angkutan kereta api pelayanan kelas ekonomi.
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi, Pasal 4 ayat 1 menyebutkan “Menteri Keuangan selaku PA BA BUN menunjuk Direkur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, selaku KPA penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan kereta api kelas ekonomi.”
3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 97/PMK.02/2022 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kereta Api Ringan Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi, Pasal 4 ayat 1 menyebutkan “Menteri Keuangan

selaku PA BA BUN menetapkan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, selaku KPA BUN Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek."

4) Berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-321/AG/2023 tanggal 30 November 2023 perihal Penyampaian Perubahan Penetapan Alokasi Anggaran Bendahara Umum Negara Tahun Anggaran 2023, disampaikan bahwa terdapat perubahan pagu anggaran dalam DIPA belanja subsidi PSO Perkeretaapian dari semula sebesar Rp5.208.693.262.000,- menjadi sebesar Rp3.154.490.594.000,-.

5) Pelaksanaan PSO Perkeretaapian dan PSO LRT Jabodebek TA 2023 telah dilakukan verifikasi tahunan pada tanggal 01 – 03 Februari 2024 dengan rincian nilai sebagai berikut:

No	Uraian	Nomor BA	Tanggal BA	Nilai
1	Verifikasi Tahunan PSO Perkeretaapain	UM.004/1/4/K2/DJKA/2024	03 Feb 2024	8.001.283.748
2	Verifikasi Tahunan PSO LRT Jabodebek	UM.004/1/6/K2/DJKA/2024	03 Feb 2024	2.804.694.961
Total				10.805.978.709

6) Pagu Belanja Subsidi PSO Perkeretaapian TA 2023 adalah sebesar Rp3.154.490.594.000,- sesuai DIPA Revisi Ke-2 Nomor SP-DIPA 999.07.1.957337/2023 dengan rincian nilai sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
1	KA Ekonomi Antarkota	238.546.234.000
2	KA Ekonomi Perkotaan	2.332.593.189.000
3	Penyelenggaraan LRT Jabodebek	119.793.951.000
4	Catatan Hal. IV.b (Tunggakan)	
	- Pembayaran sebagian tunggakan sesuai hasil audit BPK RI	121.720.273.000
	Pembayaran sebagian tunggakan sesuai hasil audit BPK RI	341.836.947.000
Total		**3.154.490.594.000**

7) Kontrak Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik PSO Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2023 Nomor PL.107/1/1/DJKA/2023 dan Nomor KL.701/I/1/KA-2023 tanggal 03 Januari 2023 sebesar Rp2.549.288.981.000,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	PSO 2023
1	**KA Antarkota**	
	KA Ekonomi Jarak Jauh	12.441.904.000
	KA Ekonomi Jarak Sedang	216.672.796.000
	KA Ekonomi Lebaran	9.431.534.000
2	**KA Perkotaan**	
	KA Ekonomi Jarak Dekat	466.180.648.000
	KRD Ekonomi	152.060.799.000
	KRL Jabodetabek	1.638.648.113.000
	KRL Yogyakarta	53.853.187.000
Total		**2.549.288.981.000**

8) Kontrak Subsidi Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (Light rail Transit) Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi Tahun Anggaran 2023 Nomor HK.201/2/1/DJKA/2023 dan

Nomor KL.701/XII/5/KA-2023 tanggal 07 Desember 2023 sebesar Rp119.793.951.000,- dengan rincian nilai sebagai berikut:

No	Uraian	PSO 2023
1	Penyelenggaraan Sarana LRT Jabodebek	69.564.652.000
2	Penyelenggaraan Prasarana LRT Jabodebek	50.229.299.000
Total		119.793.951.000

9) Satker Ditjen Perkeretaapian dalam pelaksanaan PSO Perkeretaapian melakukan verifikasi pelaksanaan PSO Perkeretaapian TA 2023 setiap bulanannya dengan rincian sebagai berikut:
   a) PSO Perkeretaapian

No	Bulan Pelaksanaan	Tagihan PT KAI	Hasil Verifikasi	Nilai Dibayarkan (Rp)
1	Januari	Nomor 0090A010PPF0PC022 Tanggal 14 Februari 2023	Nomor BA UM.004/1/7/K2/DJKA/2023 Tanggal 03 Maret 2023	187.657.081.413
2	Februari	Nomor 0114A010PPF0PC0323 Tanggal 10 Maret 2023	Nomor BA UM.004/1/9/K2/DJKA/2023 Tanggal 31 Maret 2023	168.454.761.291
3	Maret	Nomor 0104A010PPF0PC0423 Tanggal 10 April 2023	Nomor BA UM.004/1/11/K2/DJKA/2023 Tanggal 06 Mei 2023	186.635.007.851
4	April	Nomor 0110A010PPF0PC0523 Tanggal 10 Mei 2023	Nomor BA UM.004/1/12/K2/DJKA/2023 Tanggal 17 Juni 2023	176.623.662.506
5	Mei	Nomor 0113A10PPF0PC0623 Tanggal 10 Juni 2023	Nomor UM.004/1/13/K2/DJKA/2023 Tanggal 28 Juni 2023	190.320.535.720
6	Juni	Nomor 0141A01PPF0PC0723 Tanggal 10 Juli 2023	Nomor UM.004/1/16/K2/DJKA/2023 Tanggal 14 September 2023	119.775.362.791
7	Juli	Nomor 0111A010PPF0PC0823 Tanggal 08 Agustus 2023	Nomor UM.004/1/17/K2/DJKA/2023 Tanggal 15 September 2023	123.945.297.720
8	Agustus	Nomor 0050A10PPF0PC0923 Tanggal 08 September 2023	Nomor UM.004/1/18/K2/DJKA/2023 Tanggal 26 Oktober 2023	127.331.872.542
9	September	Nomor 0072A10PPF0PC1023 Tanggal 11 Oktober 2023	Nomor UM.004/1/19/K2/DJKA/2023 Tanggal 28 Oktober 2023	121.045.756.128
10	Oktober	Nomor 0099A10PPFPC1123 Tanggal 10 November 2023	Nomor UM.004/1/21/K2/DJKA/2023 Tanggal 02 Desember 2023	134.156.940.771
11	November	Nomor 0156A010PPF0PC1223 Tanggal 10 Desember 2023	Nomor UM.004/2/1/K2/DJKA/2023 Tanggal 16 Desember 2023	133.085.791.051
12	Desember	-	Nomor UM.004/2/2/K2/DJKA/2023 Tanggal 16 Desember 2023	162.779.427.920
13	Triwulan I	Nomor 0105A010PPF0PC0423 Tanggal 10 April 2023	Nomor UM.004/1/23/K2/DJKA/2023 Tanggal 09 Desember 2023	60.199.596.159
14	Triwulan II	Nomor 0142A010PPF0PC0723 Tanggal 10 Juli 2023	Nomor UM.004/1/24/K2/DJKA/2023 Tanggal 09 Desember 2023	53.974.289.469
15	Triwulan III	Nomor 0073A10PPF0PC1023 Tanggal 11 Oktober 2023	Nomor UM.004/1/25/K2/DJKA/2023 Tanggal 09 Desember 2023	41.353.204.686
16	Tahunan	Nomor 0139A010PPF0PC0124 Tanggal 10 Januari 2024	Nomor UM.004/1/4/K2/DJKA/2023 Tanggal 03 Februari 2024	8.001.283.748
17	Tunggakan	Nomor KF.201/VII/KA-2023 Tanggal 13 Juli 2023	Nomor NKF-100/999.07/PB.6/2023 Tanggal 20 Mei 2023	463.557.220.000

b) Penyelenggaraan LRT Jabodebek

No	Bulan Pelaksanaan	Tagihan PT KAI	Hasil Verifikasi	Nilai Dibayarkan (Rp)
1	Agustus	Nomor 002E010PPNPTX1223 Tanggal 17 Desember 2023	Nomor BA UM.004/2/3/K2/DJKA/2023 Tanggal 20 Desember 2023	1.476.363.427
2	September		Nomor BA UM.004/2/4/K2/DJKA/2023 Tanggal 20 Desember 2023	22.791.939.189
3	Oktober		Nomor BA UM.004/2/5/K2/DJKA/2023 Tanggal 20 Desember 2023	7.140.721.769
4	November	Nomor 0027E010PPF0PC1223 Tanggal 20 Desember 2023	Nomor BA UM.004/2/7/K2/DJKA/2023 Tanggal 23 Desember 2023	6.351.388.018
5	Desember	Nomor 0025E010PPF0PC1223 Tanggal 20 Desember 2023	Nomor BA UM.004/2/8/K2/DJKA/2023 Tanggal 23 Desember 2023	7.850.511.327
6	Triwulan III	Nomor 0028E010PPF0PC1223 Tanggal 20 Desember 2023	Nomor BA UM.004/2/9/K2/DJKA/2023 Tanggal 23 Desember 2023	2.696.478.068
7	Tahunan	Nomor 0025E010PPF01M0124 Tanggal 13 Januari 2024	Nomor BA UM.004/1/6/K2/DJKA/2024 Tanggal 03 Februari 2023	2.804.694.961

No	Bulan Pelaksanaan	Tagihan PT KAI	Hasil Verifikasi	Nilai Dibayarkan (Rp)
1	Agustus	Nomor 0001E010PPNPTX1223 Tanggal 17 Desember 2023	Nomor BA BAST-K3 DJKA 2 Tahun 2023 Tanggal 22 Desember 2023	402.760.000
2	September		Nomor BA BAST-K3 DJKA 3 Tahun 2023 Tanggal 22 Desember 2023	3.472.428.000
3	Oktober		Nomor BA BAST-K3 DJKA 4 Tahun 2023 Tanggal 22 Desember 2023	8.308.201.000
4	November	Nomor 0029E010PPF0PC1223 Tanggal 20 Desember 2023	Nomor BA BAST-K3 DJKA 5 Tahun 2023 Tanggal 22 Desember 2023	5.592.600.000
5	Desember	Nomor 0026E010PPF0PC1223 Tanggal 20 Desember 2023	Nomor BA BAST-K3 DJKA 6 Tahun 2023 Tanggal 22 Desember 2023	5.033.340.000
6	Tahunan	Nomor 0025E010PPF01M0124 Tanggal 13 Januari 2024	-	-

10) Sebagai informasi tambahan, pelaksanaan PSO Perkeretaapian Tahunan TA 2022 telah dilakukan audit oleh BPK RI dengan hasil bahwa Pemerintah masih memiliki kekurangan pembayaran sebesar Rp493.414.776.938,-. Nilai tersebut sesuai dengan angka dalam Nota Kesepakatan Final Nomor: NKF-100/999.07/PB.6/2023 tanggal 20 Mei 2023 (Audited). Nilai tunggakan tersebut telah dibayarkan sebagian pada tahun 2023 dengan nilai sebesar Rp463.557.220.000,- sehingga sisa nilai utang subsid hasil audit BPK RI TA 2022 adalah sebesar Rp29.857.556.938,-.

2. Kementerian Keuangan

a. Ditjen Anggaran

Umum:

1) Subsidi JBT, LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik dianggarkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan BBM, LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik dengan harga yang terjangkau.
2) Sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, BBM yang diberikan subsidi oleh Pemerintah adalah Jenis BBM Tertentu yang terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).
3) Menteri ESDM menetapkan harga dasar dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak. Harga dasar terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan serta margin.
4) Harga jual eceran untuk Minyak Tanah sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Harga jual eceran untuk Minyak Solar dihitung berdasarkan harga dasar ditambah dengan PPN dikurangi subsidi dan ditambah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

5) Subsidi JBT Jenis Minyak Tanah dan LPG Tabung 3 Kg terdiri dari subsidi harga dan PPN atas penyerahan BBM Jenis Minyak Tanah dan LPG Tabung 3 Kg oleh badan usaha kepada Pemerintah. Sedangkan, JBT Jenis Minyak Solar diberikan subsidi terbatas.
6) Penyaluran JBT dalam periode Tahun 2023 dilakukan melalui PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo Tbk. Sementara itu, penyaluran LPG Tabung 3 Kg dilakukan melalui PT Pertamina Patra Niaga.
7) LPG bersubsidi merupakan LPG Tabung 3 Kilogram dan diberikan kepada konsumen rumah tangga, usaha mikro, Nelayan Sasaran, dan Petani Sasaran.
8) Subsidi listrik diberikan kepada masyarakat/pelanggan dengan golongan tariff yang harga jual tenaga listrik rata-ratanya lebih rendah dari biaya pokok penyediaan tenaga listrik pada tegangan di golongan tarif tersebut.
9) Subsidi listrik tidak diberikan kepada golongan tarif yang telah menerapkan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) sesuai ketentuan perundangan.
10) Pelaksanaan atas pemberian subsidi listrik melalui BUMN operator yaitu PT PLN (Persero).

b. Ditjen Perbendaharaan

1) Perubahan KPA Subsidi SSRG Dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-186/KMK.02/2023 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka Skema Subsidi Resi Gudang pada Kementerian Perdagangan, terhitung sejak tanggal 23 Mei 2023, KPA SSRG telah dialihkan kepada Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas pada Kemendag. Berkenaan dengan hal tersebut maka segala tagihan subsidi bunga SSRG akan diproses KPA SSRG baru.
2) Untuk kemudahan pengawasan dan administrasi, tagihan yang saat ini masih dalam proses KPPN KI tidak dilanjutkan kembali dan tagihan agar disampaikan ulang kepada KPA SSRG baru. Sebagaimana diatur dalam PMK-187/PMK.05/2021, tagihan untuk akad s.d. tanggal penetapan PMK, tagihan subsidinya diajukan dengan menggunakan mekanisme PMK171/PMK.05/2009 (metode lama). c. Untuk tagihan dengan akad setelah tanggal penetapan PMK-187/2021, akan diproses setelah SIKP SSRG telah siap sepenuhnya d. Perlu diperhatikan bahwa Bank Penyalur wajib memastikan bahwa debitur SSRG untuk penyaluran sesuai PMK-187/2021 telah valid identitasnya (NIK/NPWP), pengecekan calon debitur SSRG sesuai PMK-187/2021 dapat dilakukan dengan bantuan SIKP KUR (untuk pengecekan validitas NIK/NPWP-nya saja).
3) Penghentian Pembayaran Subsidi Skema KKPE, KPEN RP, dan KUPS
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-5/MK.05/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Pelaksanaan Kredit Program Skema Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan, Penyaluran kredit program KUPS dan KPEN-RP untuk sementara dihentikan per 1 Januari 2015 dan hanya membayarkan subsidi bunga atas kredit yang telah disalurkan sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian. KUPS memiliki masa kredit 6 tahun sehingga subsidi yang dapat dibayarkan sampai dengan periode 2020. KPEN-RP memiliki masa kredit 5 tahun untuk komoditas kelapa sawit dan kakao sehingga subsidi yang dapat dibayarkan sampai dengan periode 2019, dan untuk komoditas karet memiliki masa kredit 7 tahun sehingga subsidi yang dapat dibayarkan sampai dengan periode 2021. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor-1050/MK.05/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penghentian Penyaluran KKPE,

penyaluran baru KKPE dihentikan terhitung sejak 1 Januari 2016. Dengan Penghentian ini maka perjanjian kerja sama pendanaan tetap berlaku sampai dengan dilakukannya penutupan. Subsidi bunga KKPE tetap dibayarkan atas kredit yang diperjanjikan paling akhir tanggal 31 Desember 2015 dan memiliki masa kredit 5 tahun sehingga subsidi yang dapat dibayarkan sampai dengan periode 2020. Dengan berakhirnya periode pemberian subsidi, pada tahun 2023 seluruh kewajiban subsidi KKPE dan KPEN-RP pemerintah telah selesai dibayarkan. Terkait kewajiban subsidi KUPS akan diselesaikan pada tahun 2024 dengan memperhatikan ketersediaan anggaran tahun 2024.

4) Subsidi Cadangan Pangan Pemerintah

Subsidi Bunga Pinjaman Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) merupakan arah presiden Joko Widodo dalam Perpres CPP Nomor 125 Tahun 2023 agar mengoptimalkan Dana Transfer Umum (DTU) maupun Anggaran Tak Terduga untuk digunakan dalam fasilitasi distribusi pangan dalam rangka pemerataan stok pangan dari daerah surplus ke defisit. Dalam rangka ketersediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu melakukan penguasaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada BUMN. Dalam rangka pelaksanaan pinjaman untuk keperluan penyelenggaraan CPP, Pemerintah dapat memberikan jaminan kredit dan subsidi bunga kepada Perum Bulog dan/atau BUMN Pangan (Pasal 15 ayat 1). Ketentuan mengenai tata cara pemberian jaminan kredit dan/atau subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan (Pasal 15 ayat 3). Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pemerintah. Tujuan dari Subsidi Bunga Pinjaman CPP adalah mendukung penyelenggaraan CPP dari sisi APBN dalam bentuk subsidi bunga, dengan mekanisme pinjaman B-to-B. Pinjaman diberikan dalam rangka pengadaan CPP, tidak termasuk pengelolaan dan penyaluran. Pinjaman diberikan untuk 11 komoditas yaitu beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan. Stakeholders dalam Subsidi Bunga Pinjaman CPP antara lain Bapanas yang mendapat penugasan untuk penyelenggaraan urusan di bidang pangan, Kementerian BUMN selaku induk organisasi dari BUMN (Bulog, BUMN Pangan, dan Himbara), Kementerian Keuangan sebagai penetapan kebijakan dukungan APBN dhi. Subsidi Bunga Pinjaman CPP dan sebagai KPA Penyaluran, Penyelenggara CPP dilakukan oleh Bulog dan IDE Food, dan sebagai penyalur adalah Bank Himbara (BRI, Mandiri, dan BNI).

c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

1) Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat dari dampak pandemi Covid-19, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 (diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020), Pemerintah dapat memberikan penjaminan secara langsung dan/atau melalui badan usaha yang ditunjuk. Penjaminan secara langsung oleh Pemerintah hanya dapat diberikan kepada BUMN, sedangkan penjaminan melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk penjaminan atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan. Adapun tujuan pemberian penjaminan pemerintah tersebut untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan

ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

2) Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Penjaminan Program PEN adalah penjaminan yang diberikan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Dalam pelaksanaan penjaminan program PEN bagi UMKM, Korporasi dan BUMN :
   a) Dalam rangka melaksanakan Penjaminan Pemerintah Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Menteri Keuangan menugaskan PT Jamkrindo dan PT Askrindo untuk melakukan penjaminan untuk sektor riil dan sektor keuangan yang meliputi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, dan koperasi yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
   b) Dalam rangka melaksanakan Penjaminan Pemerintah Pelaku Usaha Korporasi, Menteri menugaskan LPEI untuk memberikan Penjaminan Pemerintah bagi pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan yang kekayaan bersihnya di atas Rpl0 miliar dan omzet tahunannya di atas Rp50 miliar yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dalam Pelaksanaan Penjaminannya Menteri menugaskan LPEI untuk melakukan penjaminan bersama dengan PT PII.
   c) Dalam rangka melaksanakan Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri menugaskan PT PII dan LPEI untuk memberikan Penjaminan kepada BUMN yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan mendapat penugasan dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional.

3) Realisasi Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19 yang belum optimal disebabkan beberapa hal antara lain:
   a) Kondisi ekonomi yang masih tidak pasti diakibatkan masih belum optimalnya penanganan pandemik covid-19, sehingga menyebabkan Bank Penyalur masih berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada UMKM dan Pelaku Usaha Korporasi. Selain itu, dampak dari pandemik covid 19 yang menyebabkan rendahnya sisi demand mengakibatkan banyak pelaku usaha belum berminat untuk melakukan ekspansi usaha.
   b) Sebagai langkah mitigasi, Pemerintah bersama Pihak Penjamin telah beberapa kali melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta kegiatan sosialisasi melalui media daring (webinar) dengan mengundang pihak-pihak terkait lainnya.

d. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Berdasarkan data dari PT. SMI, realisasi Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah Selama periode 2023 adalah sebesar Rp160.320.970.852 digunakan untuk pembayaran subsidi bunga atas 29 pemerintah daerah penerima Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN.

3. Kementerian Pertanian

Pada Tahun Anggaran 2023 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian ditetapkan sebagai penanggungjawab kegiatan penyaluran dana subsidi pupuk. Dalam pelaksanaannya Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar dalam pelaksanaan dana subsidi pupuk, peraturan tersebut adalah:

a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk;
b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.256/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyimpanan dan Pencairan Dana Cadangan.

Direktorat Teknis lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang terkait dengan pengelolaan anggaran subsidi pupuk adalah Direktorat Pupuk dan Pestisida. Pelaksanaan pengelolaan anggaran subsidi pupuk berpedoman pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), adapun kegiatannya meliputi: subsidi pupuk, subsidi harga melalui produsen (PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda dan Pt. Pupuk Kaltim.

Anggaran subsidi pupuk digunakan untuk kegiatan penyediaan dan penyaluran subsidi harga pupuk, penggantian biaya produksi pupuk yang harus dibayar oleh pemerintah meliputi pupuk urea, ZA, SP-36, NPK serta pupuk organik dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur mengenai kebutuhan dan harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian Nomor 28 Tahun 2020.

Pendistribusian pupuk bersubsidi kepada kelompok tani dilakukan melalui pola tertutup berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi :

Kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di lini IV. Alokasi tersebut memperhatikan Permentan nomor 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Sasaran kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi adalah Petani yang telah bergabung dalam Kelompok Tani dan melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan / atau peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam serta Petani yang melakukan usaha tani sub sector tanaman pangan pada PATB; dan/atau Petani yang melakukan usaha tani sub sektor perikanan budi daya dengan luasan paling luas 1 (satu) hektare setiap musim tanam.

Informasi DIPA dan Revisi serta Perjanjian antara Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Pupuk:

Pada tanggal 03 Januari 2023 terbit DIPA awal dengan mengalokasikan anggaran senilai Rp25.276.635.119.000,00 untuk memenuhi Total Alokasi Pupuk Bersubsidi sebanyak 6.680.286 ton. Sedangkan alokasi berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 734/KPTS/SR.320/M/09/2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun

Anggaran 2023 sebanyak 9.013.706 ton.

Pada tanggal 17 Januari 2023 ditandatangani Perjanjian antara Kuasa Pengguna Anggaran Satker Subsidi Pupuk Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA. 2023 yang menetapkan nilai subsidi sebesar Rp25.276.626.564.788,00. Sehingga terdapat selisih sisa pagu senilai Rp8.554.212,00 dengan DIPA awal. Nilai subsidi diperhitungkan berdasarkan selisih Harga Pokok Penjualan (HPP) dengan Harga Eceran Tertinggi dikalikan volume Pupuk Bersubsidi.

Revisi DIPA

Pada tanggal 13 Desember 2023 DIPA mengalami perubahan Revisi ke 1 yang mengalokasikan anggaran Rp41.645.132.425.000,00 termasuk pembayaran Kurang Bayar TA. 2022 senilai Rp 16.368.497.306.000,00 dengan Total Alokasi Pupuk Bersubsidi sebanyak 6.680.286 ton.

Pada tanggal 22 Desember 2023 DIPA Revisi mengalami perubahan ke 2 dengan mengalokasikan anggaran senilai Rp42.602.791.364.000,00 bertambah dari revisi sebelumnya senilai Rp957.658.939.000,00 dengan Total Alokasi Pupuk Bersubsidi sebanyak 6.125.746 ton.

4. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Dalam melaksanakan tugas kewajiban umum/Publik Servise Obligation (PSO) Bidang Pers, Lembaga Kantor Berita Antara yang beralamatkan di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17 Jakarta 10110, menerima anggaran dari Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Periode Tahun Anggaran 2023 melalui DIPA Nomor DIPA-999.07.1.984192/2023 tanggal 3 Januari 2023 Bagian Anggaran 999.07 Pengelolaan Belanja Subsidi dengan kode satker 984192. Adapun produk berita yang dihasilkan oleh PSO Antara adalah:

a. Berita Text Hardnews
b. Berita Text Artikel
c. Berita Photo
d. Produk TV (Hardnews)
e. Produk TV (Features)
f. Infografis
g. Photo Story
h. Podcast

Sedangkan Distribusi Produk PSO Antara yaitu:

a. Jaringan Internal Antara
    1) Portal Antara Pusat
    2) Portal Antara Biro
    3) Facebook antaranews.com
    4) Twitter antaranews.com
    5) Facebook antarafoto.com
    6) Twitter antarafoto.com
b. Jaringan Kerjasama Antara
    1) Kerjasama OANA (40 kantor berita se-Asia Pasific)
    2) Media Centre Kominfo

3) Koran Sisipan
4) TV Lokal
5) Portal TV
6) TV Kabel

c. Pelanggan Antara
1) Media Online
2) Media Cetak
3) Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah
4) KBRI dan KJRI Luar Negeri
5) Kantor Berita dan Media Asing
6) Kedutaan Besar Negara Sahabat
7) TV dan Radio
8) Perusahaan Swasta

d. Kanal Distribusi yang disubsidi dan ditetapkan melalui Konstruksi Program
1) I Media dan Videotron yang dikelola oleh anak perusahaan Antara
2) TVRI Nasional dan TVRI daerah
3) TV Lokal
4) RRI
5) Radio lokal dan komunitas
6) Penempatan rubrik pada 3 koran lokal di 34 Provinsi
7) Media Sosial Ads pada Facebook, Instagram dan Line

Pagu anggaran tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp172.874.280.000,00 dan Rp168.383.356.000,00. Pagu anggaran tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 terdapat peningkatan sebesar Rp4.490.924.000,00 atau 2,67 persen. Hal ini disebabkan adanya inflasi sekitar 2 sampai dengan 3 persen, kenaikan beban biaya produksi, dan kenaikan target beberapa produk.

D.3.8. BA 999.08

D.3.8.1. Satker Pengelola Ongkos Angkut Beras Papua pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua.

Pada tahun 2023 terjadi perubahan operator dan perubahan manajemen kepengurusan OAB pada pejabat perbendaharaan sebagai berikut.

1. Perubahan operator distribusi beras ASN distrik pedalaman Provinsi Papua yang sebelumnya PD Irian Bhakti menjadi PT Pos Indonesia selaku pemenang tender pengadaan distribusi (pemindahan dan pengiriman) beras pegawai negeri sipil (PNS) distrik pedalaman Provinsi Papua Tahun 2023 sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan selaku Kepala UKPBJ Nomor ND-296/SJ.7/2023 hal Usulan Penetapan Pemenang Tender Pengadaan Distribusi (Pemindahan dan Pengiriman) Beras Pegawai Negeri Sipil (PNS) Distrik Pedalaman Provinsi Papua Tahun 2023.

2. Sejalan dengan pergantian Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua terjadi Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan ongkos angkut beras ASN distrik pedalaman Provinsi Papua TA 2023 yang sebelumnya Burhani AS menjadi Moudy Hermawan sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Nomor KEP-59/WPB.34/2023 Tentang Penunjukan Kuasa Penggunaanggaran/Kuasa Pengguna Barang,

Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran Dan Staf Pengelola Keuangan Kegiatan Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023.

3. Terdapat addendum kontrak sebanyak dua kali dengan nomor ADDENDUM-01/OAB/WPB.34/2023 tanggal 4 September 2023 dan ADDENDUM-02/OAB/WPB.34/2023 tanggal 24 Oktober 2023. Addendum kontrak yang pertama tidak mengubah nilai total kontrak hanya mengurangi nilai tagihan termin I dan dipindahkan ke nilai tagihan termin IV serta memundurkan jadwal pembayaran termin II. Addendum kontrak kedua mengubah nilai total kontrak yang sebelumnya Rp127.974.333.840 menjadi Rp114.039.790.373. Hal tersebut dikarenakan kontrak awal terlambat ditandatangani yang mengakibatkan beberapa pemerintah daerah yang diakomodasi OAB telah mengambil sendiri jatah berasnya dan terdapat beberapa pegawai ASN di beberapa pemda yang seharusnya jatah berasnya diangkut menggunakan moda darat/laut/udara menjadi diambil sendiri sehingga harga angkut menjadi lebih murah.
4. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penyaluran beras PNS distrik pedalaman Provinsi Papua tahun 2023 sampai dengan periode saat ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Rekap penyaluran beras dalam kilogram per 31 Desember 2023

Volume Kontrak	SO Bulog Terbit	Beras Didistribusi
15.304.310	15.213.390	15.213.390

   b. Beras yang telah didistribusikan terhadap SO Bulog yang diterbitkan adalah sebesar 100%.
   c. Beras yang telah didistribusikan terhadap volume kontrak adalah sebesar 99,41%.
   d. Terdapat jatah beras yang diambil sendiri oleh pemda yaitu Jan-Mar (Biak, Yapen, Mimika, dan Merauke), Jan-Feb (Supiori).
   e. Kabupaten Waropen belum menyelesaikan kewajiban pembayaran beras bulan Desember 2023 kepada Perum Bulog, sehingga SO Bulog bulan bersangkutan tidak dapat terbit.
5. Berdasarkan BAPHA – Audit Tujuan Tertentu atas Kegiatan Penyaluran dan Pembayaran Tagihan Ongkos Angkut Beras ASN (BA BUN 999.08) Tahun 2023 pada Kanwil DJPb Provinsi Papua atas audit yang dilaksanakan pada tanggal 12- 19 Desember 2023 ditemukan hal-hal sebagai berikut:
   a. Pelaksanaan distribusi pengangkutan beras tidak dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) selaku Penyedia melainkan oleh Pihak Lain di Luar Perjanjian yaitu PT. Yasa Artha Trimanunggal.
   b. PT. Pos Logistik Indonesia sebagai anak perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) melakukan perikatan dengan PT. Yasa Artha Trimanunggal untuk melaksanakan distribusi pengangkutan beras ASN Tahun 2023, meliputi seluruh kabupaten di Papua (seluruh titik serah) dengan volume beras sesuai kontrak awal sebesar 15.299.640 kg dan nilai kontrak sebesar Rp98.009.493.840,00.
   c. Berkenaan dengan hasil audit tersebut di atas Inspektorat III merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1) Mengenakan sanksi terhadap Penyedia (PT. Pos Indonesia (Persero)) berupa: i) Pemutusan kontrak; atau ii) Membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga di dalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor.
2) Mengusulkan PT Pos Indonesia (Persero) ke dalam daftar hitam (blacklist) jika sanksi yang dikenakan sebagaimana poin a adalah pemutusan kontrak.
3) Meminta PT Pos Indonesia (Persero) membuat pernyataan akan menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pihak-pihak terkait dan bertanggungjawab atas segala dampak hukum yang mungkin timbul di kemudian hari yang disebabkan oleh pelanggaran perjanjian oleh PT Pos Indonesia (Persero).

Berdasarkan hasil audit tujuan tertentu atas kegiatan penyaluran dan pembayaran tagihan Ongkos Angkut Beras ASN (BA BUN 999.08) Pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Tahun 2023 dan rekomendasi dari itjen, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua telah menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:

a. PPK telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak (Surat Nomor: S-07/PPK/OAB/WPB.34/2023 tanggal 19 Desember 2023).
b. PPK memutus kontrak dengan pertimbangan PT Pos Indonesia (Persero) selaku penyedia telah melakukan Subkontrak atas pekerjaan yang dikerjakan kepada pihak lain (Surat Nomor: S-08/PPK/OAB/WPB.34/2023 tanggal 27 Desember 2023).
c. PPK telah mengusulkan PT. Pos Indonesia (Persero) kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kedalam daftar hitam/blacklist (Surat Nomor: S-11/PPK/OAB/WPB.34/2023 tanggal 29 Desember 2023).
d. Sebagai Konsekuensi dari pemutusan kontrak maka PPK telah mengajukan Pencairan Jaminan Pelaksanaan/Bank Garansi ke PT. Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Jayapura dengan menebitkan Surat Pernyataan Wanprestasi (certificate of default) tanggal 29 Desember 2023 dan telah disetor oleh Bank Mandiri ke rekening kas negara.

D.3.8.2. Satker Pengelola Ongkos Angkut Beras Papua Barat pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat

1. Menunjuk Surat Keputusan KPA Satker Ongkos Angkut Beras Provinsi Papua Barat Nomor KEP-006/WPB.33/999976/2023 tanggal 6 Oktober 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat Nomor KEP- 001/WPB.33/999976/2023 Tentang Pejabat Perbendaharaan, Tim Pengelola Keuangan, dan Petugas Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Satker Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat Untuk Kegiatan Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat (BA 999.08.999976) Tahun Anggaran 2023, terdapat perubahan pengelola keuangan Satker Ongkos Angkut Beras Provinsi Papua Barat selama tahun 2023 sebagai berikut:

No.	Pejabat/Pegawai Lama	Pejabat/Pegawai Baru	Jabatan	Periode
1.	Agung Mulyono NIP 197505231996021001	Ery Setyawan NIP 198503162007101001	Koordinator Tim SAI	KEP-006/WPB.33/999976/2023
2.	Susanto NIP 197205161999031002	Bakhtiar Efendy Labib NIP 198404112006021003	PPSPM	KEP-006/WPB.33/999976/2023
3.	Ery Setyawan NIP 198503162007101001	Wan Aznawi Nst NIP 198308142003121004	Ketua Tim SAI	KEP-006/WPB.33/999976/2023

2. Pada tahun 2023 dan sebagaimana telah dilaksanakan di tahun sebelumnya, dalam rangka memperbaiki pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan OAB, operator tidak lagi diberikan uang muka kerja sebagaimana diberikan di tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, setiap permohonan tagihan yang disampaikan oleh Operator, PPK tetap melakukan pengujian secara formil atas lampiran dokumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2023, yang meliputi Tanda bukti Pengiriman (Delivery Order) beras, Rekapitulasi Berita Acara Penyaluran Beras, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Guna meningkatkan pengendalian dan kebenaran tagihan yang diajukan oleh Operator, untuk tahun 2023 setiap lampiran tagihan tetap ditambahkan dengan BAPB (Berita Acara Penyerahan Beras) yang merupakan berita acara yang ditandatangani operator, pihak pengangkut beras, dan pejabat/pegawai (PNS) yang ditunjuk masing-masing distrik sebagai penerima beras. Adapun kewajiban melampirkan BAPB tersebut diatur dalam kontrak OAB tahun 2023 dan Peraturan Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Papua Barat Nomor PER-01/WPB.33/999976/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Ongkos Angkut Beras Pegawai Aparatur Sipil Negara Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, yang antara lain menegaskan bahwa terkait dengan pencairan dana, operator harus pula menyampaikan BAPB masing-masing distrik selain persyaratan-persyaratan yang sudah ada di peraturan sebelumnya. Selain untuk penyaluran ke distrik pedalaman, BAPB juga menjadi persyaratan pada pengambilan dalam kota. BAPB untuk pengambilan dalam kota pada Gudang Operator ditandatangani oleh operator dan pejabat/pegawai (PNS) yang ditunjuk masing-masing distrik sebagai penerima beras. Untuk pengajuan tagihan dan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian kegiatan OAB, operator tetap diwajibkan untuk menyampaikan tagihan lengkap secara hardcopy kepada Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat, meskipun transportasi udara/darat masih terdapat kendala di beberapa lokasi di Provinsi Papua Barat.

3. Selanjutnya dalam rangka untuk menjamin pelaksanaan kegiatan OAB ASN Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya tahun 2023 sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan guna menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat pada bulan Januari sampai dengan Desember 2023 telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan OAB. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan di BPKAD/DPPKAD, OPD, Kantor Cabang Perum Bulog, dan Kantor Cabang Irian Bhakti (Operator) di beberapa Kabupaten lingkup Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Berkenaan dengan kegiatan tersebut juga telah dilaksanakan Audit Penyaluran Beras dan Pembayaran Tagihan OAB PNS Tahun 2022 dan 2023 pada Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat dari Inspektorat Jenderal Kementerian

Keuangan mulai tanggal 9 s.d. 22 November 2023, di bawah tanggung jawab Inspektur III yang beranggotakan:

i. Ika Istakariana, S.E., M.Ak/196509071985032001 selaku Pengendali Teknis
i. Linda Sortauli Malau, S.E., Ak./198009162009012004 selaku Ketua Tim
ii. Ria Riesta Iswardani, S.E./198605152010122004 selaku Anggota Tim
iii. Arditya Dwi Kurniawan, S.M./199008202013101002 selaku Anggota Tim
iv. Icam Dadi Dawuh, S.E./199104012012101001 selaku Anggota Tim
v. Dian Permana Putro, S.Ak./199302122014111001 selaku Anggota Tim

Adapun hasil temuan atas audit tersebut secara garis besar mempunyai isu utama sebagaimana berikut:

Pelaksanaan Pengangkutan Beras ASN Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat oleh PT Pos Indonesia yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian dikarenakan pelaksanaannya dilakukan oleh pihak lain (PT Yasa Artha Trimanunggal) dengan Potensi Kerugian Negara sebesar Rp5.289.122.680,00. Atas hal tersebut, Inspektorat Jenderal merekomendasikan untuk:

4. Memberikan sanksi pemutusan kontrak dengan memperhitungkan prestasi pekerjaan yang telah dilakukan s.d. tanggal pemutusan kontrak.
5. Memasukkan PT Pos Indonesia ke dalam daftar hitam (blacklist).

   Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat selaku Satker Pengelola Ongkos Angkut Beras menindaklanjuti dan menanggapi temuan itjen tersebut sesuai dengan waktu penyelesaian yang ditentukan. Dapat diinformasikan bahwa salah satu tanggapan dan tindak lanjut temuan adalah Kanwil DJPb Papua Barat telah bersurat kepada PT Pos Indonesia melalui surat nomor S-017/WPB.33/999976/2023 tanggal 22 Desember 2023 perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan kepada Direktur Utama PT Pos Indonesia. Selain itu Kanwil DJPb Papua Barat telah bersurat ke LKPP melalui nomor S-143/WPB.33/2024 tanggal 25 Januari 2024 dalam permintaan rekomendasi/pendapat hukum terkait tindak lanjut yang seharusnya dilakukan KPA OAB atas rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk pengenaan sanksi daftar hitam (blacklist) sebagai penyedia barang/jasa pemerintah kepada PT Pos Indonesia (Persero).
6. Pada tahun 2023, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI atas Laporan Keuangan tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya juga terus dilakukan. Terdapat progress tindak lanjut rekomendasi BPK-RI yang masih dalam proses yaitu rekomendasi BPK-RI atas Laporan Keuangan Tahun 2017 dan Tahun 2018, dimana terdapat perbedaan pencatatan jumlah kuantum (kilogram) beras yang diantar antara pihak Bulog dan pihak PD. Irian Bhakti selaku operator. Untuk menyelesaikan rekomendasi BPK tersebut, telah dilakukan Rekonsiliasi tiga pihak antara Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat, Bulog dan PD. Irian Bhakti. Oleh karena itu, kami lampirkan laporan progres tindak lanjut rekomendasi BPK dimaksud beserta dokumen pendukung yang menjadi bukti tindak lanjut atau penyelesaian rekomendasi sebagaimana terlampir.

D.3.8.3. Satker Pengelola Dana Kompensasi pada Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Dan Kekayaan Negara Dipisahkan.

1. Pelaksanaan pembayaran kompensasi akan dilakukan dengan memperhatikan kelengkapan administratif pencairan dan dengan mempertimbangkan ketersediaan kas Pemerintah.

2. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S-264/MK.02/2023 tanggal 31 Maret 2023 perihal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk akibat Penetapan Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar Tahun 2022 dan S-265/MK.02/2023 tanggal 31 Maret 2023 perihal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Penetapan Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Bensin (Gasoline) RON 90 Tahun 2022, telah dilaksanakan pembayaran atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo, Tbk akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM Tahun 2022 sebesar Rp49.285.038.738.380,00 dalam 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:

Keterangan	Kurang Bayar 2022	Realisasi Pembayaran Kekurangan Tahun 2022				Sisa Kurang Bayar 2022
		Tahap I (2 Mei 2023)	Tahap II (24 Mei 2023)	Tahap III (9 Juni 2023)	Jumlah	
Kompensasi kepada PT PERTAMINA	48.997.444.476.003	24.498.722.238.001	12.249.361.119.001	12.249.361.119.001	48.997.444.476.003	
JBT Minya Solar	35.679.851.956.254	24.498.722.238.001	11.181.129.718.253		35.679.851.956.254	
JBKP Premium	13.317.592.519.749		1.068.231.400.748	12.249.361.119.001	13.317.592.519.749	
Kompensasi kepada PT AKR	287.594.262.377	287.594.262.377			287.594.262.377	
Total Kompensasi BBM	**49.285.038.738.380**	**24.786.316.500.378**	**12.249.361.119.001**	**12.249.361.119.001**	**49.285.038.738.380**	

3. Selanjutnya, dalam Pemeriksaan atas Laporan Keuangan UAP BUN 999.08 Belanja Lainnya TA 2022 terdapat usulan jurnal koreksi dari BPK RI, sehingga jumlah Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo, Tbk akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM Tahun 2022 menjadi sebesar Rp49.428.187.379.882,00, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Kurang Bayar Berdasarkan Surat Menteri Keuangan	Kurang Bayar Berdasarkan Pemeriksaan BPK RI	Selisih (Koreksi Jurnal)
Kompensasi kepada PT PERTAMINA	48.997.444.476.003	49.140.754.458.912	(143.309.982.909)
JBT Minyak Solar	35.679.851.956.254	35.823.174.618.999	(143.322.662.745)
JBKP Premium	13.317.592.519.749	13.317.579.839.913	12.679.836
Kompensasi Kepada PT AKR	287.594.262.377	287.432.920.970	161.341.407
Total Kompensasi BBM	**49.285.038.738.380**	**49.428.187.379.882**	**(143.148.641.502)**

4. Apabila Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo, Tbk akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM Tahun 2022 berdasarkan pemeriksaan BPK RI sebesar Rp49.428.187.379.882,00 dibandingkan dengan realisasi pembayaran sebesar Rp49.285.038.738.380,00, maka masih terdapat kekurangan pembayaran atas kompensasi BBM Tahun 2022 sebesar Rp143.148.641.502,00 dengan rincian:

a. Kekurangan Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (HJE BBM) JBT Minyak Solar Tahun 2022 sebesar Rp143.322.662.745 yang merupakan koreksi penambahan utang berdasarkan BA Hasil Pemeriksaan BPK RI.
b. Kelebihan Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM JBKP Pertalite Tahun 2022 sebesar Rp12.679.836 yang merupakan yang merupakan koreksi pengurangan utang berdasarkan BA Hasil Pemeriksaan BPK RI.
c. Kelebihan Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk. akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Tahun 2022 sebesar Rp161.341.407 yang merupakan yang merupakan koreksi pengurangan utang berdasarkan BA Hasil Pemeriksaan BPK RI.

5. Berikut tabel Utang Kompensasi BBM selengkapnya:

Keterangan	Utang per 31 Desember 2022 sesuai Asersi	Utang per 31 Desember 2022 sesuai BPK	Pembayaran (di Tahun 2023 sesuai asersi)	Sisa Utang
Kompensasi kepada PT PERTAMINA	48.997.444.476.003	49.140.754.458.912	48.997.444.476.003	143.309.982.909
BBM Solar 2022	35.679.851.956.254	35.823.174.618.999	35.679.851.956.254	143.322.662.745
BBM Pertalite 2022	13.317.592.519.749	13.317.579.839.913	13.317.592.519.749	(12.679.836)
Kompensasi Kepada PT AKR	287.594.262.377	287.432.920.970	287.594.262.377	(161.341.407)
BBM Solar 2022	287.594.262.377	287.432.920.970	287.594.262.377	(161.341.407)
Total Kompensasi BBM	**49.285.038.738.380**	**49.428.187.379.882**	**49.285.038.738.380**	**143.148.641.502**

a. Terhadap sisa utang sebesar Rp143.148.641.502 dimaksud, telahdiproses penyelesaian pembayarannya bersamaan dengan penyelesaian pembayaran dana kompensasi BBM periode Triwulan I Tahun 2023.
b. Berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor: S-953/MK.02/2023 tanggal 19 November 2023 perihal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Penetapan Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Bensin (Gasoline) RON 90 Periode Triwulan II Tahun 2023 dan Penetapan Final Kompensasi Tahun 2021, diantaranya ditetapkan Nilai final kekurangan penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat penetapan harga jual JBT Minyak Solar dan JBKP Bensin (Gasoline) RON 90 tahun 2021 dengan jumlah koreksi sebesar Rp569.203.082.685, dengan rincian:
    1) Kelebihan pembayaran dana kompensasi JBT Minyak Solar sebesar Rp7.738.686.904.
    2) Kekurangan pembayaran dana kompensasi JBKP *Premium* sebesar Rp574.993.620.400.
    3) Kekurangan pembayaran dana kompensasi JBKP Eks Pertalite sebesar Rp1.948.149.189.

Dalam Surat Direktur Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan nomor: PE.12.03/S-143/D404/1/2024 tanggal 7 Februari 2024 perihal Notisi atas Reviu Perhitungan Dana Kompensasi BBM Tahun 2023, disampaikan hasil reviu sebagai berikut:

Keterangan	Hasil Reviu dalam Notisi BPKP 2023
Kompensasi kepada PT Pertamina	**126.263.272.204.708**
JBT Minyak Solar	74.185.925.661.764
JBKP Pertalite	52.077.346.542.944
Kompensasi kepada PT AKR	**630.943.402.145**
Total Kompensasi BBM	**126.894.215.606.853**

Berdasarkan hasil reviu dimaksud, KPA telah menyusun asersi manajemen sebagai beriikut:

Keterangan	Hasil Reviu dalam Notisi BPKP 2023	Realisasi Belanja	Utang per 31 Des 2023
Kompensasi kepada PT Pertamina	**126.263.272.204.708**	**82.727.866.313.682**	**43.535.405.891.026**
JBT Minyak Solar	74.185.925.661.764	48.815.436.036.593	25.370.489.625.171
JBKP Pertalite	52.077.346.542.944	33.912.430.277.089	18.164.916.265.855
Kompensasi kepada PT AKR	**630.943.402.145**	**398.364.829.388**	**232.578.572.757**
Total Kompensasi BBM	**126.894.215.606.853**	**83.126.231.143.070**	**43.767.984.463.783**

Selanjutnya, dalam dalam Catatan Hasil Reviu dari Inspektorat Jenderal dinyatakan terdapat koreksi overstated atas perhitungan kompesasi JBT Minyak Solar pada PT Pertamina Patra Niaga sebesar Rp15.048.705.539. Mengacu hasil reviu tersebut, maka perhitungan beban dan utang kompensasi BBM tahun 2023 menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Hasil Reviu dalam Notisi BPKP 2023	Realisasi Belanja	Utang per 31 Des 2023
Kompensasi kepada PT Pertamina	**126.248.223.499.169**	**82.727.866.313.682**	**43.520.357.185.487**
JBT Minyak Solar	74.170.876.956.225	48.815.436.036.593	25.355.440.919.632
JBKP Pertalite	52.077.346.542.944	33.912.430.277.089	18.164.916.265.855
Kompensasi kepada PT AKR	**630.943.402.145**	**398.364.829.388**	**232.578.572.757**
Total Kompensasi BBM	**126.879.166.901.314**	**83.126.231.143.070**	**43.752.935.758.244**

c. Realisasi Pendapatan hingga periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp675.985.479.244 merupakan koreksi untuk pengakuan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima atas kelebihan pembayaran berdasarkan surat Direktur Utama PT PLN (Persero) nomor 30834/KEU.01.07/F01000000/2023 tanggal 7 Juni 2023.

d. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S-292/MK.02/2022 tanggal 2 April 2022 perihal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT PLN (Persero) akibat Penetapan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2021, telah dilaksanakan pembayaran atas Kekurangan Penerimaan PT PLN (Persero) akibat kebijakan penetapan tarif tenaga listrik tahun 2021 sebesar Rp24.594.425.188.000,00 pada tahun 2022.

e. Selanjutnya dalam surat Direktur Utama PT PLN (Persero) nomor 30834/KEU.01.07/F01000000/2023 tanggal 7 Juni 2023 hal Penyelesaian Kelebihan Bayar Kompensasi Tahun 2021 dan Pembayaran Sisa Kompensasi Tahun 2022 disampaikan bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Kepatuhan atas Perhitungan Penyesuaian Tarif tenaga Listrik dan Dana Kompensasi Tarif Tenaga Listrik Tahun 2021 pada PT PLN (Persero) dan Instansi Terkait nomor 4/S/IX-XX/01/2023 tanggal 17 Januari 2023, hasil BPK adalah sebesar Rp23.918.439.708.756,00, sehingga terdapat kelebihan pembayaran kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp675.985.479.244,00.

f. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.2/2022, atas kelebihan pembayaran kompensasi tarif tenaga listrik tahun 2021 tersebut telah diperhitungkan dengan pembayaran kompensasi listrik untuk kekurangan pembayaran kompensasi listrik tahun 2022 tahap ketiga di periode Triwulan III tahun 2023, sehingga dengan demikian tidak terdapat piutang kompensasi listrik PT PLN (Persero) akibat kelebihan pembayaran dana kompensasi tarif tenaga listrik tahun 2021.

g. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.2/2022, dana kompensasi TA 2023 dalam LKBUN Dana Kompensasi TA 2023 unaudited dicatat berdasarkan Asersi Manajemen KPA BUN Dana Kompensasi yang mengacu pada hasil reviu BPKP atas perhitungan kekurangan penerimaan badan usaha akibat penetapan HJE BBM dan tarif tenaga listrik tahun 2023.

h. Dengan mempertimbangkan proses penyusunan LKBUN yang dilakukan melalui reviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2021, maka nilai utang kompensasi energi TA 2023 dikoreksi menjadi sebesar Rp61.588.132.989.258 (BBM sebesar Rp43.752.935.758.244 dan Listrik sebesar Rp17.835.197.231.014).

i. Terdapat koreksi Beban dan Utang dana kompensasi BBM hasil pemeriksaan lembaga pemeriksa yang berwenang yang terdiri dari JBT Solar PT PPN sebesar Rp3.553.645.877, JBKP Pertalite PT PPN sebesar Rp1.097.944.133 dan JBT Solar PT AKR sebesar Rp62.285.363 sehingga Utang kepada Pihak Ketiga pada Satker Pengguna Anggaran Dana Kompensasi sebesar Rp61.583.419.113.884

D.3.8.4. Satker Dit. Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian

1. Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan BA.999.08.969380.KP merupakan satker inaktif karena tidak lagi mendapat alokasi anggaran sejak tahun 2013.

2. PT. SHS melalui Surat No. 744/DIR/SHS.01/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 Menjadwalkan Ulang (Rescheduling) Penyelesaian Kewajiban PT. Sang Hyang Seri atas LHP BPK RI No. 25/LHP/XVII/06/2013 berupa uang muka penyegaran benih CBN pada PT Sang Hyang Seri (Persero) yang harus disetorkan ke Kas Negara senilai Rp4.811.607.957.

D.3.8.5. Satker Layanan Pos Universal, Kemenkominfo

1. Bantuan Operasional Layanan Pos Universal mulai dianggarkan melalui BA BUN 999.08 pada tahun 2013 melalui mekanisme SABA. Mulai tahun 2014, kegiatan tersebut dianggarkan melalui DIPA BA BUN 999.08. Pada Tahun Anggaran 2023, program pengelolaan Subsidi Operasional LPU dianggarkan melalui DIPA Nomor SP DIPA-999.08.1.984526/2023 tanggal 30 Desember 2022 Bagian Anggaran 999.08 Pengelolaan Belanja Lain-Lain dengan kode satker 984526.

2. Subsidi Operasional LPU digunakan untuk membiayai Kantor LPU sesuai ketentuan yang terdapat pada Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 216 Tahun 2023 tentang Pedoman Perhitungan dan Pengawasan Subsidi Operasional Layanan Pos Universal. Dana Subsidi Operasional LPU diberikan berdasarkan metode pelaporan realisasi pendapatan dan biaya penyelenggaraan Layanan Pos Universal sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika dimaksud.

3. Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 503 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 147 Tahun 2023 tentang Penetapan Kantor Layanan Pos Universal dalam Rangka Penyelenggaraan Layanan Pos Universal Tahun 2023, jumlah Kantor LPU pada tahun 2023 ini ditetapkan sebanyak 2.460 kantor.

4. Capaian output Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (BA 999.08) Kementerian Komunikasi dan Informatika pada satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

BA Es.1	Kode Satker	Nama Satker	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Belanja			Capaian RO				Ket.
								Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Satuan	%	
999.08	984526	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	12	4.893	9GA	001	Dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat/ Daerah Lainnya	378.269.521.000	366.120.584.924	96,79%	2460	2460	KPC LPU	100	Layanan Pos Universal (LPU) terselenggara di 2460 Kantor LPU, pembayaran secara keseluruhan dilakukan triwulanan

Capaian Capaian output kegiatan Pengelolaan Bantuan Operasional Layanan Pos Universal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 telah tercapai sebanyak 2.460 KPC LPU atau mencapai 100 persen dari target output yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri

Komunikasi dan Informatika Nomor 503 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 147 Tahun 2023 tentang Penetapan Kantor Layanan Pos Universal dalam Rangka Penyelenggaraan Layanan Pos Universal Tahun 2023.

D.3.8.6. Satker BPKPBPB Batam

a. Rencana Kerja dan Anggaran BP Batam (984423) TA 2023:

Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BA BUN(Kode Satker 984423 TA 2023 mendapat persetujuan Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan pada tanggal 30 Desember 2022 melalui Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bendahara IJmum Negara (BUN) Nomor: SP DIPA- 999.08.1.984423/2023 dengan nilai pagu sebesar Rp246.442.623.000.

Selama periode Tahun 2023 DIPA BP Batam (984423) mengalami satu kali Revisi DIPA dengan tanggal Revisi 30 November 2023, revisi tersebut tidak mengurangi atau merupak nilai DIPA.

b. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK:

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam pelaksanaan pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2022 telah menyampaikan Laporan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Belanja Lain- Lain (999.08) Tahun 2022 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BA999.08.984423), melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 23/LHP/XVlll/05/2023 tanggal 10 Mei 2023. Tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut adalah telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara Tahun 2023 terhadap biaya kelebihan pembayaran pekerjaan tersebut.

c. Rekening Pemerintah:

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) memilikiri 5 Rekening Pemerintah yang telah disetujui pembukaan rekeneing tersebut oleh KPPN Batam pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui Surat Persetujuan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, No. B.621.e-INS/PEN/09/2022 dengan rincian:

No.	Nama Rekening	No. Rekening
1	BPG 137 BP KAWASAN BATAM BUN	654059844231000
2	BPP 137 SEKRETARIAT DEWAN KAWASAN BUN	654059844231001
3	BPP 137 BP KAWASAN BINTAN BUN	654059844231002
4	BPP 137 BP KAWASAN TANJUNGPINANG BUN	654059844231003
5	BPP 137 BP KAWASAN KARIMUN BUN	654059844231004

Satker Belanja Lain-Lain Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun mengalami perubahan kode satker. yaitu yang semula 984422 (Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun) menjadi 984423 (Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam). Perubahan kode satker tersebut terjadi berdasarkan ketentuan pada pasal 108 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

seña mengacu pada Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI Nomor S3532/AG/2013 tanggal 30 Desember 2013 perihal Usulan Penetapan dan Surat Kesediaan Ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bedahara Umum Negara (KPA BUN) Pengelolaan Belanja Lainnya (999.08) TA 2014.

Nilai Aset dan Kewajiban yang berada pada satker 984423 sama dengan satker 984422. yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) dari Tahun 2014 hingga kini.

D.3.8.7. Satker ICSID (International Center For Settlement of Invesment Dispute) pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

Temuan Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap LK BA 999.08 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah berdasarkan LHP BPK Nomor: 78/LHP/XV/05/2014 tanggal 26 Mei 2014 terdapat temuan Pembayaran Honorarium Tim Pendukung Penanganan Permohonan Arbitrase Melebihi Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013 Sebesar Rp2.271.660.000 dan Pembayaran Honorarium sekitar Rp1,78 miliar Belum Sepenuhnya Didukung Pelaksanaan Kegiatan. Atas temuan tersebut telah dilakukan pembahasan dengan Tim BPK pada tanggal 22 Juni 2022 dengan data dukung Nota Dinas Inspektur VI Inspektorat Jenderal Kemenkeu Nomor ND- 391/IJ.7/2021 tanggal 28 Agustus 2021 hal Tanggapan atas Permintaan Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK atas Temuan ICSID dan Surat Inspektur VI Inspektorat Jenderal Nomor S-6/IJ/2015 tanggal 16 Januari 2015 hal Tanggapan atas Permintaan Progress Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BA BUN Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun 2013.

D.3.8.8. Satker Distribusi dan Cadangan Pangan

1. Pada Tahun 2023 telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahap Pertama diantaranya mengatur: Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional sebagai KPA BUN Dana Penyelenggaraan CPP, sehingga pengelolaan cadangan beras permerintah yang semula pada KPA Satker Pengelola Dana Cadangan Beras Pemerintah pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran dialihkan ke KPA Satker Distribusi dan Cadangan Pangan.
2. Pada Rabu, 27 September 2023 telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-508/KPN.1207/2023 yang diserahkan dari KPA BUN Penyalur Dana Cadangan Beras Pemerintah kepada Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan selaku KPA BUN Dana Cadangan Pangan Pemerintah. Berdasarkan BAST tersebut. menerima kewajiban atas utang kepada pihak ketiga sebesar Rp. 3.101.577.212.413,00 dengan rincian Penyelesaian Tunggakan KPSH Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2021-2022 sebesar Rp 2.692.311.313.000,00, Biaya Pengarungan dan Distribusi Bantuan Beras Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Tahun 2021 sebesar Rp382.216.934.728.000,00, dan Sisa Tunggakan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Bencana Alam 2022 sebesar Rp27.048.965.992.000,00. Penetapan nilai tersebut berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perhitungan Harga Pembelian Beras Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2022 Pada Perum Bulog. Satuan kuatum ketiga kegiatan tersebut adalah paket. Hal tersebut sesuai dengan utang yang sudah disepakati oleh Kementerian Keuangan sebagai utang negara terhadap Perum BULOG.

3. DIPA Satker Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan terbit tanggal 24 November 2023 dengan alokasi dana sesuai yang diusulkan yaitu Rp3.101.577.214.000. Pada 6 Desember 2023 dilakukan pembayaran untuk Tunggakan KPSH CBP 2021-2022, Tunggakan BB PPKM 2021, dan Tunggakan CBP untuk Bencana Alam 2022.
4. Pada 22 Desember 2023 diusulkan tambahan anggaran untuk DIPA CPP 2023 sebesar Rp9.773.567.395.000 untuk pembayaran atas penugasan Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Tahap I dan Penyaluran CPP untuk SPHP Tw 1-3 TA 2023. Pada 29 Desember 2023 terbit DIPA Revisi 1 dan dilakukan pembayaran kepada Perum BULOG untuk Bantuan Pangan Tahap I dan Penyaluran CPP untuk SPHP Tw 1-3 TA 2023 sebesar Rp9.773.567.393.008.

D.3.8.9. Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja

1. Setelah tanggal 31 Desember 2023 terdapat pelunasan tagihan S-104 atas nama PT Bukalapak Tbk untuk pengembalian biaya pelatihan yang menjadi temuan oleh Direktorat Pemantauan dan Evaluasi MPPKP pada Lembaga GETI Incubator, Rumah Siap Kerja dan Sekolah Pintar sebesar Rp4.500.OOO.
2. Pada tanggal 10 Januari 2024 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Direktur Hukum Umum dan Keuangan MPPKP Nomor S-002/Dir-HUK/1/2024 dan S-003/Dir-HUK/1/2024 dan MPPKP memberikan sanksi. kepada Lembaga Pelatihan Kita Mahir dan ZenPro by Zenius karena terbukti melakukan pelanggaran berat. Sanksi yang diberikan yaitu:
3. Pencabutan penetapan Lembaga Pelatihan Kita Mahir dan ZenPro by Zenius sebagai lembaga pelatihan dalam ekosistem Program Kartu Prakerja melalui Surat Keputusan Direktur Eksekutif MPPKP Nomor 8 Tahun 2024 untuk Pencabutan Lembaga Pelatihan Kita Mahir dan Surat Keputusan Direktur Eksekutif MPPKP Nomor 9 Tahun 2024 untuk Pencabutan Lembaga Pelatihan ZenPro by Zenius ; dan
4. Mengembalikan biaya pelatihan yang telah dibayarkan oleh MPPKP, yaitu:
    a. Lembaga Pelatihan Kita Mahir harus mengembalikan biaya pelatihan sebesar Rp634.650.OOO melalui platform digital Pintar; dan Lembaga Pelatihan ZenPro by Zenius harus mengembalikan biaya pelatihan sebesar Rp4.563.980.000 melalui platform digital pintar dan
    b. Lembaga Pelatihan ZenPro by Zenius harus mengembalikan biaya pelatihan sebesar Rp4.563.980.000 melalui platform digital Karier.mu dan Tokopedia masing-masing sebesar Rp705.700.OOO dan Rp3.858.280.000

    Pengembalian biaya pelatihan paling lambat harus dibayarkan pada tanggal 14 Januari 2023.

    Selain itu tidak ada kejadian-kejadian penting yang memberikan dampak buruk secara langsung terhadap pelayanan yang diberikan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja kepada masyarakat umum..
5. Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja mengelola rekening di Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Pembantu Tebet dengan nomor rekening sebagai berikut
6. Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja mengelola rekening di Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Pembantu Tebet dengan nomor rekening sebagai berikut:

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	Status
1	1334621057	Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) TA 2022	Non-Aktif
2	1582052174	RKK MPP Kartu Prakerja	Aktif
3	1055845437	Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Untuk Penihilan	Aktif
4	1597032637	Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) TA 2023	Aktif

Berdasarkan PMK No 25/PMK.05/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 200/PMK.05/2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, KPA BUN mengajukan persetujuan pembukaan rekening kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara (PKN) atas nama Dirjen Perbendaharaan atas Rekening-rekening diatas sesuai dengan Penggunaannya sebagaimana tabel diatas, Adapun persetujuan atas rekening itu sebagai berikut:

a. Rekening Penihilan Pengembalian Dana Kartu Prakerja (RPL 019 PS KARTU PRAKERJA UTK PENIHILAN) telah mendapat persetujuan Direktur PKN No S-4/PB/PB.3/2021 tanggal 2 September 2021, rekening ini digunakan sebagai Rekening perantara sebelum dilakukannya pengembalian Dana Program ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

b. Rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (BPG 019 MPP Kartu Prakerja) telah mendapat persetujuan dari Kepala KPPN Jakarta II No S-886/WPB.12/KP.02/2021 tanggal 15 April 2021, rekening ini digunakan untuk menampung dana pengelolaan Uang Persediaan Satker.

c. Rekening RPL Dana Kartu Prakerja Tahun 2022 telah mendapat persetujuan dari Direktur PKN No S-274/PB.3/2023 tanggal 25 Mei 2023, rekening ini digunakan sebagai Rekening Penampungan untuk Pengelolaan Dana Program Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan Surat Direktur Eksekutif MPPKP Nomor S-195/Dir-Eks/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal permintaan penutupan Rekening Induk pada Program Kartu Prakerja (RPL 2022), karena telah bersaldo Rp0 sejak tanggal 17 Maret 2023. RPL tahun 2022 telah ditutup oleh pihak BNI pada tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan perintah tertulis Direktur PKN melalui surat nomor S-274/PB.3/2023.

d. Rekening RPL Dana Kartu Prakerja Tahun 2023 telah mendapat persetujuan dari Direktur PKN No S-3/PB.3/2023 tanggal 4 Januari 2023, rekening ini digunakan sebagai Rekening Penampungan untuk Pengelolaan Dana Program Tahun Anggaran 2023.

7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Capaian Output:

Selama periode berjalan per 31 Desember 2023 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Manajemen Pelaksana diterbitkan tanggal 30 Desember 2022 dengan nomor: SP DIPA-999.08.1.999255/2023 dan surat pengesahan DIPA dari DJA dengan nomor surat 5-378/AG/2022 tanggal 30 Desember 2022. Alokasi Anggaran Manajemen Pelaksana dalam DIPA tersebut sebesar 2,67 Triliun Rupiah dengan target 595 ribu peserta. Melalui surat pemberitahuan DJA tentang perubahan alokasi dana Program Kartu Prakerja nomor: S-66/AG/2023 tanggal 1 Maret 2023, Revisi DIPA pertama berupa penambahan alokasi anggaran diterbitkan pada tanggal 20 Juli 2023 sebesar

4,37 Triliun Rupiah dengan target 1 juta peserta. Revisi DIPA kedua berupa penambahan target penerima menjadi 1.151.833 dengan Pagu tetap sebesar 4,37 Triliun Rupiah diterbitkan pada tanggal 6 November 2023. Revisi POK pada tahun 2023 telah dilakukan 9 (sembilan) kali dengan perbandingan sebagai berikut:

Sub Komp	Uraian	POK Awal	Revisi POK 9
51	Implementasi Pelatihan dan Insentif Program Kartu Prakerja	2.499.000.000.000	4.200.000.000.000
58	Pengoperasian Program Kartu Prakerja	68.723.910.000	49.090.170.000
59	Pengembangan Teknologi untuk Mendukung Program Kartu Prakerja	30.677.232.000	29.794.756.000
60	Pelaksanaan Kemitraan dan Pengembangan Ekosistem Program Kartu Prakerja	11.363.294.000	16.959.144.000
61	Pengembangan Komunikasi dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja	5.708.772.000	11.811.804.000
62	Pemantauan dan Evaluasi Program Kartu Prakerja	14.398.554.000	20.982.598.000
63	Pengelolaan SDM, Keuangan, dan Infrastruktur Hukum Program Kartu Prakerja	27.297.150.000	28.007.243.000
64	Pengelolaan Satker, Komite, Tim Pelaksana, dan Sekretariat Program Kartu Prakerja	12.831.088.000	14.354.285.000
Jumlah		**2.670.000.000.000**	**4.371.000.000.000**

8. Per 31 Desember 2023 terdapat Dana Lainnya berdasarkan PMK nomor 109 Tahun 2023 Pasal 2, dimana kriteria tersebut pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran 2023 dan pekerjaan tersebut penyelesaiannya dilanjutkan melewati batas akhir tahun anggaran 2023. Dalam hal ini, MPPKP mencadangkan dana yang dibatasi penggunaanya untuk menampung beberapa kontrak pekerjaan yang batas akhir pengajuan tagihannya sampai dengan 31 Desember 2023 dalam Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Berikut ini merupakan rincian dana pembayaran kontrak pekerjaan yang dicadangkan beserta dengan realiasi yang pembayaran yang SP2D-nya dicairkan pada tahun anggaran 2024:

No	Jenis	Nilai Pekerjaan yang Diajukan (Rp)	Realisasi Nilai Pekerjaan yang Dibayarkan (Rp)	Realisasi Nilai Pekerjaan Nilai Pekerjaan yang Terkoreksi (Rp)
1	Pembayaran KAP Tasnim, Ferdiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan dan Rekan Termin 12	153.135.600	153.135.600	-
2	Pembayaran PT Paragon Pratama Teknologi	199.022.445	199.022.445	-
3	Pembayaran PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Termin 3	50.394.000	50.394.000	-
4	Pembayaran PT VADS Indonesia Termin 12	2.964.521.052	2.296.441.062	668.079.990
5	Pembayaran PT Sosial Teknologi Indonesia Termin 12	1.760.152.765	823.939.983	936.212.782
6	Pembayaran PT MNC Land Mark Tbk Termin 6	618.547.500	306.193.500	312.354.000
Total		**5.745.773.362**	**3.829.126.590**	**1.916.646.772**

D.3.8.10. SKK Migas

1. Menindaklanjuti surat Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan – Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No S-14/PB/PB.6/2022 tangal 04 Maret 2022, perihal Pengaturan Lebih Lanjut Atas Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Atas Pencadangan Dana Abandonment and Site Restoration (ASR) Yang Ditempatkan Pada Rekening Bersama Antara SKK Migas/BPMA dan KKKS Terkait Kegiatan Hulu Migas. Pencatatan dan pelaporan pada laporan keuangan Dana ASR dilakukan secara periodik dengan menyajikan saldonya pada tanggal pelaporan. Penyajian atas saldo Dana ASR disajikan pada Neraca SKK Migas dan tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas.
2. Dana ASR merupakan akumulasi dana yang disimpan di dalam rekening bersama (escrow account) yang diawasi oleh SKK MIGAS dan Kontraktor yang dicadangkan untuk pelaksanaan kegiatan pasca operasi (ASR) yaitu kegiatan untuk menghentikan pengoperasian fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya secara permanen dan menghilangkan kemampuannya untuk dapat dioperasikan kembali, serta melakukan pemulihan lingkungan di wilayah Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pencadangan dana ASR dimulai sejak KKKS berproduksi komersial sampai dengan produksi berakhir (umur ekonomis lapangan) dan dilakukan setiap semester dalam mata uang USD ke Rekening Bersama berdasarkan estimasi biaya ASR yang terakhir dibagi dengan jangka waktu pengumpulan. Pengelolaan dan penatausahaan dana ASR pada rekening bersama dilakukan oleh SKK Migas berdasarkan Perjanjian Rekening Bersama antara SKK Migas, KKKS dan Bank. Untuk Saldo Dana ASR Tahun 2023 disajikan dengan menggunakan kurs penutupan per 31 Desember 2023 (1 USD = Rp15.439).
3. Usulan Rencana Kerja dan Anggaran SKK Migas TA 2023 mendapat persetujuan Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan pada tanggal 30 Desember 2022 melalui Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (“DIPA”) Bendahara Umum Negara (“BUN”) Nomor: SP DIPA-999.08.1.999975/2023 dengan nilai pagu sebesar Rp1.679.826.790.000,00.
4. Selama periode Januari – Desember 2023 DIPA SKK Migas mengalami Relokasi Anggaran sebagai berikut:
    a. Revisi DIPA
        1) Revisi DIPA I tanggal 3 April 2023 oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk membiayai Tunggakan Kewajiban TA 2022 sebesar Rp5.634.816.000,00.
        2) Revisi DIPA II tanggal 12 September 2023 oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk membiayai Usulan Kegiatan Baru/Tambahan Anggaran Output II TA 2023 sebesar.
        3) Revisi DIPA III tanggal 21 September 2023 oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan berupa Pemutakhiran POK V.
        4) Revisi DIPA IV tanggal 4 Desember 2023 oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan berupa Pemutakhiran POK.
        5) Revisi DIPA V tanggal 8 Desember 2023 oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan berupa Pemutakhiran POK.

6) Revisi DIPA VI tanggal 15 Desember 2023 oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan berupa Pemutakhiran POK.

b. Revisi POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA):

1) Revisi POK I disetujui tanggal 14 Maret 2023 sebesar Rp4.826.852.000,00 dan
2) Revisi POK II disetujui tanggal 04 Mei 2023 sebesar Rp3.299.375.000.
3) Revisi POK III disetujui tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp5.703.491.000.
4) Revisi POK IV disetujui tanggal 3 Agustus 2023 sebesar Rp4.278.276.000.
5) Revisi POK V disetujui tanggal 14 September 2023 sebesar Rp15.596.397.000.
6) Revisi POK VI disetujui tanggal 18 Oktober 2023 sebesar Rp3.391.181.000.
7) Revisi POK VII disetujui tanggal 9 November 2023 sebesar Rp8.208.209.000.
8) Revisi POK VIII disetujui tanggal 23 November 2023 sebesar Rp2.894.531.000.
9) Revisi POK IX disetujui tanggal 30 November 2023 sebesar Rp24.696.237.000.
10) Revisi POK X disetujui tanggal 7 Desember 2023 sebesar Rp?.311.923.000.
11) Revisi POK XI disetujui tanggal 13 Desember 2023 sebesar Rp193.178.000.

5. Pada tanggal 26 Juni 2023, telah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-62-/AG/2003 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Renovasi Pada SKK Migas yang disampaikan melalui Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-64/AG.5/2023 tanggal 11 Juli 2023. Daftar BMN yang akan dihapuskan adalah ATR pada Kantor Perwakilan Kalsul sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
1.	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	6070301001	10	2016	Rp141.495.900
2.	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	6070301001	7	2017	Rp48.653.450
3.	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	6070301001	8	2019	Rp49.846.500
4.	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	6070301001	9	2019	Rp49.675.450
Total					**Rp289.671.300**

Aset Tetap Renovasi pada Kantor Perwakilan Kalsul tersebut terjual dengan nilai sebesar Rp6.543.456 (enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana Risalah Lelang Nomor 374/60/2023 tanggal 9 Agustus 2023, dan telah dilakukan pelunasan oleh pemenang lelang pada tanggal 10 Agustus 2023.

Pada tanggal 29 September 2023, telah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-92/AG/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Renovasi Pada SKK Migas yang disampaikan melalui Surat Direktur Jenderal

Anggaran Nomor S-85/AG.5/2023 tanggal 29 September 2023. Daftar BMN yang akan dihapuskan sebagai berikut:

Total nilai penghapusan ATR selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Total Nilai ATR yang Dihapuskan	1.298.073.575
Total Penyusutan ATR yang Dihapuskan	(32.505.356)
Beban Kerugian Pelepasan Aset	**1.265.568.219**

NO.	KODE BARANG	NUP	JENIS BMN	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN
1.	6070301001	7	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	ATR pada SKK Migas Perwakilan Jabanusa	2021	1 Unit	194.415.575
2.	6070301001	8	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	ATR pada SKK Migas Perwakilan Jabanusa	2021	1 Unit	49.374.600
3.	6070301001	9	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	ATR pada SKK Migas Perwakilan Jabanusa	2018	1 Unit	44.770.000
4.	6070301001	10	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	ATR pada SKK Migas Perwakilan Jabanusa	2018	1 Unit	42.000.000
5.	6070301001	11	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	ATR pada SKK Migas Perwakilan Jabanusa	2019	1 Unit	95.947.500
6.	6070301001	12	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	ATR pada SKK Migas Perwakilan Jabanusa	2020	1 Unit	47.500.000
7.	6070301001	13	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	ATR pada SKK Migas Perwakilan Jabanusa	2018	1 Unit	174.474.600
8.	6070301001	7	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	ATR pada SKK Migas Perwakilan Sumbagsel	2016	1 Unit	44.000.000
9.	6070301001	5	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	ATR pada SKK Migas Perwakilan Sumbagut	2018	1 Unit	193.600.000
10.	6070301001	6	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	ATR pada SKK Migas Perwakilan Sumbagut	2019	1 Unit	122.320.000
Jumlah						**10 Unit**	**1.008.402.275**

D.3.8.11. Aset Eks BPMIGAS

Pada tanggal 20 Maret 2023 telah diterbitkan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara hal Pengelolaan Aset Eks BPMIGAS yang menetapkan kebijakan terkait pengelolaan/pencatatan aset eks BPMigas. Dalam surat tersebut, memperhatikan bahwa entitas SKK Migas yang merupakan kelanjutan dari BPMigas, maka pencatatan BMN tersebut dapat dilakukan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan agar dilakukan oleh SKK Migas sebagai Unit Badan Lainnya (UBL) Satker yang terkonsolidasi pada BA-BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08). Pengelolaan lebih lanjut atas BMN eks BP Migas tersebut akan berpedoman pada ketentuan mengenai pengelolaan dan/atau penatausahaan BMN.

SKK Migas telah melakukan inventarisasi dan penilaian atas Asel Eks BPMIGAS sesuai Serita Acara Hasil Inventarisasi Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja SKK Migas Nomor: SRT-01 69/SKKIC5000/2023/SO dennan hasil sebagai berikut:

No	Klasifikasi Aset	Jumlah	Nilai
1	Aset Intrakomptabel	161 Unit	370.308.000
2	Aset Ekstrakomptabel	3.410 Unit	574.329.000
	Total	3.571 Unit	944.637.000

Aset Eks BPMIGAS tersebut telah dicatat pada Aplikasi SAKTI dan tefah disajikan sebagai Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Laporan Keuangan SKK Migas per 31 Desember 2023.

D.3.9. BA 999.09

1. Entitas UAP BUN PBL

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, Selanjutnya terhadap daftar UBL sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-296/PB/2022 Tentang Perubahan Unit Badan Lainnya yang tercantum dalam daftar Unit Badan Lainnya pada sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, Pada tahun 2022 terdapat penambahan 3 UBL baru, pengurangan 3 UBL, dan penyesuaian 3 UBL dengan rincian sebagai berikut:

a. Penambahan 3 UBL Baru, antara lain:
   1) Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
   2) Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
   3) Kantor Staf Presiden

b. Pengurangan 3 UBL, antara lain:
   1) Lembaga Perlindungan Saksi Korban
   2) Bapertarum
   3) Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan

c. Penyesuaian 3 UBL, yaitu:
   1) Badan Restorasi Gambut menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
   2) Komite Nasional Keuangan Syariah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
   3) Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal menjadi Badan Pengelola Masjid Istiqlal

Dalam Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2023, terhadap 70 UBL tersebut secara garis besar dikelompokkan sebagai berikut:

a. UBL Satker/ Bagian Satker sebanyak 62 UBL.
b. UBL Bukan Satker sebanyak 8 UBL.

Untuk SKK MIGAS dan OJK dikategorikan sebagai UBL Satker sekaligus sebagai UBL Bukan Satker.

Terdapat Unit Badan Lainnya yang berstatus tidak aktif/belum aktif/belum mengelola APBN yaitu:

a. Badan Pertimbangan Kepegawaian
   Pada Tahun 2021 Badan Pertimbangan Kepegawaian berganti menjadi Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

b. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)
   Sesuai surat Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan Nomor OT.01.01/I/041/2013 tanggal 7 Januari 2013 hal Hasil Inventarisasi Eksistensi UBL di lingkungan Kementerian Kesehatan, dinyatakan bahwa Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) dinyatakan belum aktif.

c. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)
   Sesuai dengan surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan nomor S-03/D.I.M.EKON/01/2017 tanggal 30 Januari 2020 bahwa pada tahun 2018 tidak ada usulan PTP maupun tambahan PTP sehingga belum ada kegiatan Rapat koordinasi Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (persero) ataupun alokasi Dana.

d. Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)
Pada tahun 2018 Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU) tidak mendapatkan alokasi Dana.

e. Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG)
Pada tahun 2018 Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG) tidak mendapatkan alokasi Dana.

f. Otorita Asahan
Sesuai dengan PERPRES 73 TAHUN 2018 Otorita Asahan telah dibubarkan dan proses Likuidasinya saat ini maasih dalam penyelesaian oleh Kementerian Perekonomian.

g. Komite Nasional Geopark Indonesia
Pada tahun 2020, Komite Nasional Geopark Indonesia sebagai UBL satker/bagian satker belum aktif dan tidak mendapatkan dana APBN.

h. Otoritas Nasional Senjata Kimia
Pada tahun 2020, Otoritas Nasional Senjata Kimia sebagai UBL satker/bagian satker belum aktif dan tidak mendapatkan dana APBN.

i. Badan Promosi Pariwisata Indonesia
Pada tahun 2020, Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagai UBL satker/bagian satker belum aktif dan tidak mendapatkan dana APBN.

2. Laporan Keuangan Badan Lainnya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya , UAP BUN-PBL menyusun laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Ikhtisar laporan Keuangan.

Rincian untuk Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya diuraikan dalam lampiran LD31a, LD31b, LD31c.

Dalam Laporan Keuangan UAP BUN-PBL Tahun 2023 Unaudited sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-296/PB/2022, menyajikan ekuitas bersih atas beberapa Unit Badan Lainnya sebagai berikut:

a. Otorita Asahan
b. Taman Mini Indonesia Indah
c. Yayasan Gedung Veteran RI
d. Badan Amil Zakat Nasional
e. Badan Wakaf Indonesia
f. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
g. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS)
h. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

a. Otorita Asahan

Otorita Asahan dibentuk berdasarkan Kepres Nomor 5 tahun 1976 sebagai Badan yang bertugas mewakili Pemerintah dan bertanggung jawab atas kelancaran pembangunan dan pengembangan Proyek Asahan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-1788/A/2000 tanggal 4 Mei 2000 dinyatakan bahwa sejak tahun 2000 Otorita Asahan tidak dibiayai APBN, dan selanjutnya akan disediakan oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

Pada tanggal 8 Mei 2000 telah ditandatangani perjanjian sehubungan dengan penggantian biaya Otorita Asahan *(the Agreement Concerning the Reimbursment of Expenses of Otorita)* antara PT. Inalum dan Otorita Asahan, yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1) PT. Inalum akan mengganti sebagian dari pengeluaran Otorita Asahan atas jasa yang telah diberikan kepada PT. Inalum, kecuali pengeluaran untuk kegiatan pemerintah dan administrasi yang dilakukan Otorita Asahan seperti ijin dan lain-lain.
2) PT. Inalum akan membayar kepada Otorita Asahan setiap tahun fiskal dengan basis seimbang sebagaimana dilakukan pada NAA atas imbalan jasanya kepada PT. Inalum. Basis seimbang berarti pembayaran kembali kepada Otorita Asahan merupakan kompensasi atas pengeluaran Otorita Asahan yang terjadi dalan rangka pemberian jasa kepada PT. Inalum seperti halnya kepada NAA. Jumlah pembayaran kembali ke Otorita tersebut tidak melebihi jumlah yang dibayarkan PT. Inalum kepada NAA.

Pada tanggal 26 Maret 2002 dalam *Shareholder Forum* PT. Inalum di Jakarta, telah disepakati bersama bahwa atas penjualan alumunium yang tidak dapat diserap oleh pasar Indonesia, Otorita Asahan dapat melakukan kerjasama dengan PT. Inalum untuk menjual alumunium kepada pihak ketiga di luar negeri.

a. Sifat dan Kedudukan

1) Berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden;
2) Badan Pembina Proyek Asahan berkedudukan di Jakarta;
3) Otorita Pengembangan Proyek Asahan berkedudukan di Medan.

b. Tujuan Pendirian

Mewakili Pemerintah untuk mengawasi dan membantu pelaksanaan proyek Asahan baik selama masa konstruksi maupun setelah perusahaan beroperasi sebagai tindak lanjut atas Perjanjian Induk mengenai Pusat Listrik Tenaga Air dan Peleburan Aluminium Asahan (Proyek Asahan).

c. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Memberikan fasilitas dan jaminan bagi pelaksanaan persetujuan induk secara tepat dan berhasil;
2) Mengamankan kepentingan-kepentingan Pemerintah dan PERSERO Pengusahaan serta Pengembangan usaha Perlistrikan dan Peleburan Aluminium;
3) Mengawasi pelaksanaan Proyek sesuai dan di dalam batas-batas sebagaimana ditetapkan dalam Persetujuan Induk;
4) Memelihara kerjasama dan koordinasi secara terus menerus antara pihak-pihak dalam mencapai tujuan Persetujuan Induk;
5) Menjamin agar tata cara perijinan dan pemberian jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan Proyek Asahan dapat berjalan lancar dan tertib;
6) Mengembangkan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan Proyek Asahan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;

7) Merencanakan dan mengendalikan pengembangan jangka panjang wilayah Proyek Asahan berserta prasarananya dalam kerjasama dengan instansi yang bersangkutan;
8) Berdasarkan MOU antara PT. Inalum dengan Otorita Asahan tanggal 7 Desember 1999, Otorita Asahan ditugaskan untuk mengelola seluruh upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan serta pemberdayaan masyarakat di sekitar Proyek Asahan dengan mengalokasikan dan memanfaatkan *environmental fund*.

d. Sumber Dana dari APBN

Otorita Asahan telah dibubarkan dengan Peraturan Presiden nomor 73 Tahun 2018 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan, berdasarkan pasal 2 dan 3 barang milik negara pada Otorita Asahan diserahkan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola barang kecuali yang telah tercatat pada Kementerian Perindustrian dan seluruh dokumen yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Otorita Asahan diserahkan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan/atau Arsip Nasional Republik Indonesia. Pimpinan dan karyawan pada Otorita Asahan diberhentikan dengan hormat dan diberikan uang penghargaan yang besarannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibebankan kepada DIPA Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2018.

Proses likuidasi Otorita Asahan sampai dengan tahun 2022 *Audited* belum selesai dilaksanakan. Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tim Likuidasi Otorita Asahan bahwa tim likuidasi bertugas terhitung 3 September 2018 sampai dengan selesainya pelaksanaan likuidasi atas Otorita Asahan.

b. Yayasan Pengelolan Taman Mini Indonesia Indah

1) Dasar Hukum

Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1977 tanggal 10 September 1977 dan naskah penyerahan TMII dari Yayasan Harapan Kita kepada Pemerintah Republik Indonesia tanggal 10 April 1975, bahwa :

a) "Taman Mini Indonesia Indah" yang terletak di Daerah Kelurahan Bambu Apus, Dukuh, Lubang Buaya, dan Ceger, Kecamatan Kramat Jati dan Pasar Rebo, Jakarta Timur seluas 120 Ha beserta segala bangunan-bangunannya yang berada di atasnya, adalah milik Negara Republik Indonesia;
b) Penguasaan dan pengelolaan "Taman Mini Indonesia Indah" tersebut diserahkan kepada Yayasan Harapan Kita;
c) Yayasan Harapan Kita bertugas dan berkewajiban mengurus serta memelihara TMII dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan bangsa Indonesia serta menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan "Taman Mini Indonesia Indah" tersebut secara berkala kepada Presiden; sesuai Akta Persembahan "Taman Mini Indonesia Indah" kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia no 47 tanggal 7 September 1987, bahwa luas "Taman Mini Indonesia Indah" menjadi +150 Ha.

2) Tugas dan Kewajiban

Tugas dan kewajiban Badan Pengawas TMII adalah:

a) Membantu Yayasan Harapan Kita khususnya di bidang pengawasan, pengelolaan dan pengembangan TMII.

b) Berkewajiban merencanakan dan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan TMII dengan berkoordinasi dengan Badan Pengelola dan Pengembangan TMII dan membuat laporan hasil pengawasan secara berkala kepada Ketua Umum Yayasan Harapan Kita.
c) Ketua, Anggota, dan Sekretaris Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh ketua Yayasan Harapan Kita dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun.
d) Pengurus dan anggota Badan Pengawas bertanggungjawab kepada Ketua Umum Yayasan Harapan Kita.

Tugas dan kewajiban Badan Pengelola dan Pengembangan TMII adalah sebagai berikut:

Direktur Utama:

a) Mengendalikan, memelihara dan mengembangkan TMII yang merupakan kawasan wisata budaya, sebagai wahana pelestarian dan pengembangan budaya bangsa Indonesia untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.
b) Mengendalikan dan mengkoordinasikan secara operasional unit anjungan daerah, unit kerja di bawah BUMN, unit usaha, serta mengendalikan operasional dan administrasi unit kerja di bawah BPP TMII.
c) Menyusun rencana dan program kerja dan rencana anggaran dan pendapatan dan belanja TMII dan diajukan kepada Ketua Yayasan Harapan Kita untuk mendapatkan persetujuan.
d) Membina dan mengkoordinasikan para direktur dalam melaksanakan tugasnya.

Direktur Umum:

a) Mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan adminsitrasi, keuangan, SDM, hukum, teknik dan tata lingkungan.
b) Membantu Direktur Utama dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit anjungan daerah, unit kerja di bawah BUMN, unit usaha dan unit kerja BPP, serta unit kerja lainnya yang berada di lingkungan TMII.

Direktur Operasi:

a) Mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan operasional, pembangunan, pemeliharaan dan keamanan

Direktur Budaya:

a) Mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan seni budaya, wisata, promosi dan informasi, hubungan masyarakat dan keamanan.
b) Membantu Direktur Utama dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan tersebut dengan unit anjungan daerah, unit kerja di bawah Departemen/BUMN, unit usaha dan unit kerja Badan Pengelola dan pengembangan, serta unit kerja lainnya yang berada di lingkungan TMII.
c) BPP TMII membuat laporan secara periodik kepada Ketua Umum Yayasan Harapan Kita, tentang hasil pelaksanaan dan pengelolaan TMII.

d) BPP TMII membuat laporan secara periodik kepada Ketua Umum Yayasan Harapan Kita, tentang hasil pelaksanaan dan pengelolaan TMII.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah, penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara, dan dengan ditetapkannya penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Kementerian Sekretariat Negara maka pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Yayasan Harapan Kita berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 dinyatakan berakhir. Proses Likuidasi Taman Mini Indonesia sampai dengan penyusunan LKBL Tahun 2023 Unaudited masih berlangsung.

c. Yayasan Gedung Veteran RI

Tanggal 22 Februari 1977 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1977 yang isinya:

1) Seluruh bangunan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha" beserta tanahnya Kaveling 50 di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, adalah milik Negara Republik Indonesia.
2) Penguasaan dan pengelolaan Gedung Veteran dimaksud diserahkan kepada Yayasan Gedung Veteran Republik Indonesia.
3) Tugas dan wewenang:
   a) Yayasan Gedung Veteran Republik Indonesia bertugas mengurus dan memelihara Gedung dan memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan para Veteran Republik Indonesia serta masyarakat umumnya.
   b) b. Menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan gedung tersebut secara berkala kepada Presiden RI.
4) Pelaksanaan administratif dari Keputusan Presiden ini dilaksanakan oleh Menteri Sekretaris Negara bersama-sama Pimpinan Yayasan Gedung Veteran Republik Indonesia.
   Pada tahun 1983, Kongres V LVRI di Medan menetapkan YGVRI sebagai anak organisasi LVRI, sebagai salah satu unit pelaksana organik LVRI.

d. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri yang berwenang melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

BAZNAS didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan badan pengelola zakat yang mengedepankan prinsip transparansi, professional dan amanah dalam melaksanakan kegiatannya.

1) Dasar Hukum

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

b) Susunan keanggotaan BAZNAS dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2004.

2) Visi dan Misi

Visi: "Menjadi Badan Zakat Nasional yang Amanah, Transparan dan Profesional."

Misi:

a) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
b) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
c) Menumbuhkembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi.
d) Mewujudkan pusat data zakat nasional.
e) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

3) Fungsi dan Wewenang

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
d) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Kewenangan BAZNAS:

a) Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
b) Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.
c) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

4) Sumber Dana

APBN (Kementerian Agama), Penerimaan Zakat, Infaq dan sedekah, amil, hibah dan non syariah.

e. Badan Wakaf Indonesia

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama, Keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 75/M tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta 13 Juli 2007. Jadi BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan beralamat di Gedung Bayt Al-Quran Lantai 2, Jalan Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13560.

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat

diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia (Pasal 55, 56, 57, UU No.41/2004).

1) Dasar Hukum

a) Badan Wakaf Indonesia didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya.

2) Visi dan Misi

Visi Badan Wakaf Indonesia adalah "Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional".

Sedangkan misinya yaitu "Menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat".

3) Tugas dan Wewenang

Sesuai Pasal 49 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a) Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
b) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
c) Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
d) Memberhentikan dan mengganti nazhir;
e) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
f) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan;

4) Struktur Organisasi

a) Terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan;
b) Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia;
c) Dewan Pertimbangan merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia;
d) Masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota;
e) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan ditetapkan oleh para anggota.

5) Sumber Dana

a) APBN selama 10 (sepuluh) tahun pertama dan dapat diperpanjang.
b) Dibebankan kepada Anggaran Kementerian Agama.

f. SKK MIGAS

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 31 Desember 2012 manyatakan bahwa fungsi dan tugas BP MIGAS diambil alih oleh pemerintah c.q. kementerian terkait sampai diundangkannya Undang-Undang yang baru yang mengatur hal tersebut. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang sebelumnya dilaksanakan oleh BPMIGAS dialihkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, menyatakan bahwa pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh SKK Migas dan berlaku surut mulai 13 November 2012.

1) Visi dan Misi

Visi

Menjadi mitra yang proaktif dan terpercaya dalam mengoptimalkan manfaat industri hulu minyak dan gas bumi bagi bangsa dan seluruh pemangku kepentingan serta menjadi salah satu lokomotif penggerak aktivitas ekonomi Indonesia.

Misi

Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kontrak kerja sama dengan semangat kemitraan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2) Tugas dan fungsi

Tugas

Melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik Negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Fungsi

a) Memberikan pertimbangan kepada menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran wilayah kerja serta kontrak kerja sama.
b) Melaksanakan penandatanganan kontrak kerja sama.
c) Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu wilayah kerja kepada menteri untuk mendapatkan persetujuan.
d) Memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
e) Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran.
f) Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada menteri mengenai pelaksanaan kontrak kerja sama.
g) Menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

Wewenang

a) Membina kerjasama dalam rangka terwujudnya integrasi dan sinkronisasi kegiatan operasional kontraktor kontrak kerja sama.

b) Merumuskan kebijakan atas anggaran dan program kerja kontraktor kontrak kerja sama.
c) Mengawasi kegiatan utama operasional KKKS.
d) Membina seluruh aset kontraktor kontrak kerja sama yang menjadi milik Negara.
e) Melakukan koordinasi dengan pihak dan/atau instansi terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu.

g. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas serta wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

1) Visi dan Misi

Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan uang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi OJK adalah:
a) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.
b) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
c) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

2) Tujuan, Fungsi dan Tugas

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:
a) Terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
b) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
c) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB.

h. Badan Pengelola Keuangan Haji

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, kemudian ditindaklanjuti dengan penunjukan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana melalui Keputusan Presiden Nomor 74P Tahun 2017 Tanggal 7 September 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji.

1) Dasar Hukum
a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
b) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji;

c) Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji;
d) Keputusan Presiden Nomor 74P Tahun 2017 tentang Pengangkatan Keanggotan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji.

2) Tugas dan Fungsi

Badan Pelaksana memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji.

Untuk melaksanakan fungsi perencanaan Keuangan Haji Badan Pelaksana bertugas:
a) merumuskan kebijakan: kemampuan Keuangan Haji, perkembangan ekonomi; dan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji;
b) menyiapkan rencana strategis; dan
c) menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji.

D.3.10. BA 999.99

UAP BUN TK DJPb

A. Satker PFK

1. Saldo akhir utang menurut akrual sama dengan saldo akhir utang menurut kas

Saldo akhir utang menurut akrual sama dengan saldo akhir utang menurut kas. Hal ini dijelaskan sebagai berikut: saldo akhir utang menurut akrual dipengaruhi oleh saldo awal utang menurut akrual ditambah dengan penerimaan PFK Pegawai, dikurangi pengeluaran PFK Pegawai, ditambah/dikurangi saldo akhir piutang (menggambarkan potensi penerimaan kas yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan), serta dipengaruhi oleh koreksi utang. Sampai dengan Bulan Desember tahun 2023, rincian saldo utang menurut akrual dan utang menurut kas adalah sebagai berikut:

No	Uraian	LK UAKPA (Rp)	Neraca Percobaan Ledger Kas (Rp)
1.	Saldo Awal Utang	809.370.991.446	809.370.991.446
2.	Mutasi Utang / Kas (81-82)	123.215.218.912	123.105.566.071
	Akun 81*		36.720.510.052.192
	Akun 82		36.597.404.486.121
3.	**Saldo Akhir (1+2)**	932.586.210.358	932.476.557.517
4.	Koreksi Utang		
5.	Piutang (*lih*. B.2)		109.652.841
6.	**Saldo Akhir (3+4+5)**	**932.586.210.358**	**932.586.210.358**

*Tidak termasuk Akun 118122

2. Penyajian Neraca Percobaan Basis Akrual dan Neraca Percobaan Basis Kas dalam lampiran Laporan Keuangan.

Penyajian dimaksudkan untuk memberikan keyakinan mengenai rincian saldo utang per 31 Desember 2023 dan memberikan informasi mengenai transaksi penerimaan setoran/potongan PFK Pegawai dan transaksi pembayaran pengembalian penerimaan PFK Pegawai.

3. Penerimaan dana PFK untuk BP Tapera tercatat pada laporan keuangan karena sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan 212/PMK.05/2020 tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga, akun-akun terkait penerimaan BP Tapera sudah diaktifkan.

4. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

   Penyaluran penerimaan Dana PFK Pegawai sampai dengan 31 Desember 2023, ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pembayaran (SKP) dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-3/PB/PB.3/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga Lanjutan kepada PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan Perum Bulog berdasarkan realisasi penerimaan PFK sampai dengan 31 Desember 2023. Penerbitan SKP ini sejalan dengan BAB VI Penetapan SKP-PFK Lanjutan dan Pembayaran Dana PFK Pegawai atas SKP-PFK Lanjutan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2020.

   Adapun realisasi pembayaran per badan penyelenggara adalah sebagai berikut:

No	Pihak Ketiga	Nilai Utang (Rp)	Realisasi SKP (Rp)	Sisa (Rp)
1	Perum Bulog	(6.121.066)	0	(6.121.066)
2	PT Taspen (Persero)	121.484.623.448	120.908.852.007	575.771.441
3	PT Asabri (Persero)	197.192.160	201.422.047	(4.229.887)
4	BP Tapera	424.766.381	0	424.766.381

   Khusus untuk BPJS Kesehatan, dirinci sebagai berikut:

No	Utang	Nilai Utang (Rp)	Realisasi SKP (Rp)	Sisa (Rp)
5	211111	108.326.063.610	109.417.702.854	(1.091.639.244)
	211117	648.091.522.061	647.599.983.394	491.538.667
	211119	54.062.042.698	54.032.165.218	29.877.480
	211112	(241.188)	(241.188)	0
	211116	(503.512)	(503.512)	0
	211121	(102.787.075)	(101.980.735)	(806.340)

B. Satker Pensiun

1. Pencatatan hak dan kewajiban terkait Program Pensiun PNS dan TNI/Polri dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Dengan belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah mengenai Program Pensiun PNS sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Aparatur Sipil Negara, regulasi yang menjadi payung hukum program Pensiun bagi PNS dan TNI/Polri adalah UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela. Dengan belum terbentuknya dana pensiun, pembebanan belanja

pensiun masih bersumber dari APBN, sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf (a) UU Nomor 11 Tahun 1969.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 beserta regulasi turunannya mengamanatkan bahwa program Pensiun bagi PNS dan TNI/Polri adalah Program Pensiun Manfaat Pasti (Defined Benefit). Sedangkan mekanisme pendanaan yang digunakan adalah *pay as you go* yang dibiayai dari APBN. Implikasi dari Program Pensiun Manfaat Pasti dengan pendanaan *pay as you go* adalah Pemerintah membayarkan manfaat pensiun pada saat pegawai sudah berhak menerima pensiun (sebagai penerima pensiun), yaitu ketika yang bersangkutan memasuki usia pensiun sesuai peraturan perundangan-undangan.

Nilai kewajiban jangka panjang program pensiun per 31 Desember 2023 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria I Gde Eka Sarnaja, FSAI dan Rekan yang ditunjuk dengan surat Menteri Keuangan nomor S-786/MK.2/2023 tanggal 3 Oktober 2023 hal Penunjukan Aktuaris Independen untuk Menghitung Kewajiban Jangka Panjang Program Pensiun Pemerintah Tahun 2023. Atas penunjukan tersebut, Konsultan Aktuaria sudah melakukan perhitungan kewajiban jangka panjang dan telah dilaporkan oleh Direktur Jenderal Anggaran kepada Menteri Keuangan.

Nilai kewajiban jangka Panjang program pensiun per 31 Desember 2023 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Anggaran kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-234/AG/2024 tanggal 22 Mei 2024 hal Penyampaian Hasil Perhitungan Aktuaris mengenai Kewajiban Jangka Panjang Program Pensiun Pemerintah Tahun 2023 sebesar Rp3.120.693.808.287.170,00 dengan rincian:

Peserta	PT Taspen	PT Asabri	Jumlah
Pegawai Aktif	1.058.864.006.361.080	220.493.143.371.975	1.279.357.149.733.050
Pensiunan	1.625.061.205.418.640	216.275.453.135.476	1.841.336.658.554.120
Total	**2.683.925.211.779.720**	**436.768.596.507.451**	**3.120.693.808.287.170**

Kewajiban jangka panjang Program Pensiun tahun 2023 tersebut dapat terbagi sebagai berikut:

a. Kewajiban terhadap pegawai aktif sebesar Rp1.279.357.149.733.055,00
b. Kewajiban terhadap Pensiunan sebesar Rp1.841.336.658.554.116,00

Kewajiban jangka panjang Program Pensiun tahun 2023 tersebut juga dapat dikelompokan ke dalam kewajiban terhadap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Kewajiban terhadap pegawai Pemerintah Pusat sebesar Rp1.202.943.295.577.480,00, yang terdiri dari:
    1) Pada PT Taspen sebesar Rp766.174.699.070.029,00
    2) Pada PT Asabri sebesar Rp436.768.596.507.451,00
b. Kewajiban terhadap pegawai Pemerintah Daerah sebesar Rp1.917.750.512.709.690,00

2. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175 Tahun 2023 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus, terdapat UAKPA BUN TK pengelola belanja/beban pengeluaran untuk keperluan layanan perbankan yang dilaksanakan oleh unit eselon

II di DJPb yang menangani pengelolaan pengeluaran keperluan layanan perbankan. Akuntansi dan pelaporan keuangan atas transaksi tersebut dilaksanakan oleh UAKPA BUN TK Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (987361) yang mengelola belanja/beban Jaminan sosial, belanja/beban selisih harga beras Bulog, dan pelaporan akumulasi iuran pensiun.

3. Berkaitan dengan Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) atau Iuran Dana Pensiun (IDP) pada PT Kereta Api Indonesia / PT KAI (Persero), dapat disampaikan sebagai berikut:
   a. Nilai AIP Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) tahun 2022 dan 2023 sebesar Rp1.184.350.160.251 dan Rp1.182.060.998.353 sesuai Laporan Administratif Dana Belanja Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Dephub pada PT KAI (Persero) per 31 Desember 2023 *Audited* tanggal 25 Maret 2024.
   b. Pada saat ini, AIP Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) dikelola terpisah dari AIP PNS. Dalam hal ini, AIP Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) akan disetorkan ke dalam AIP PNS pada saat program penyesuaian pensiun eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) berakhir, yakni pada saat tidak ada lagi penerima pensiun eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero). Hal ini sesuai dengan PMK Nomor 170/PMK.02/2016 tentang Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) pasal 9 ayat (4), yang berbunyi "Pada saat program penyesuaian pensiun eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) berakhir, Akumulasi Dana Pensiun Pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero) disetorkan ke dalam akumulasi iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil."
   c. Sehubungan dengan poin b, maka nilai AIP Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) tidak masuk ke dalam Neraca Laporan Keuangan UAKPA BUN Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (kode satker 987361).

4. Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-1013/MK.02/2023 tanggal 8 Desember 2023 hal Penyampaian Revisi Perstujuan Metode dan Asumsi Perhitungan Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan Program THT Tahun 2023, metode dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan KMPMD Program THT adalah sebagai berikut:

Uraian	2022	2023
Metode Asumsi:	GPV	GPV
Based on data	31 Januari 2022	31 Januari 2023
Bunga Aktuaria	9,50%	7,50%
Kenaikan gaji	Sesuai hasil studi perusahaan	Sesuai hasil studi perusahaan
Selisih usia pasangan	Data aktual	Data aktual
Selisih usia dengan anak	Data aktual	Data aktual
Batas usia	Data aktual	Data aktual
Laju Kematian	Sesuai studi terkini	TNA 2016
Inflasi	Data aktual	Data aktual

Berdasarkan persetujuan metode dan asumsi tersebut, PT Asabri (Persero) melakukan perhitungan KMPMD sesuai dengan data peserta pada tanggal 31 Desember 2023. Terdapat selisih perhitungan antara KMPMD dengan suku bunga 7,5% dengan suku bunga 9,5%. Sesuai dengan PMK Nomor 86 Tahun 2023 bahwa kekurangan pendanaan yang disebabkan oleh perubahan metode dan asumsi (dalam hal sesuai S-1031/MK.02/2023) diakui sebagai Unfunded Past Service Liability (UPSL).

Atas perubahan metode dan asumsi tersebut, Menteri Keuangan melalui Surat nomor S-310/MK.02/2024 tanggal 27 Maret 2024 hal Pengakuan dan Penetapan Unfunded Past Service Liability (UPSL) Program THT yang Dikelola PT Asabri (Persero) Tahun 2023 menyatakan antara lain terdapat UPSL pada program THT yang dikelola oleh PT Asabri (Persero) di tahun 2023 sebesar Rp5.171.631.486.375,00. Atas penetapan tersebut, masih akan dikaji lebih lanjut kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

5. Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Bendahara Umum Negara

   Sehubungan dengan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Bendahara Umum Negara Tahun 2019, 2021, dan 2022, terdapat temuan yang berkaitan dengan kewajiban jangka panjang program pensiun, akumulasi iuran pensiun, dan UPSL Program THT dengan tiga rekomendasi yang saat ini masih dalam proses tindak lanjut.

UAP BUN TK DJA

Satker PNBP Khusus BUN Pengelola PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi (984572)

Ringkasan Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas dari Kontrak Kerja Sama Tahun 2023

Berikut ini adalah ringkasan hasil kegiatan usaha hulu migas dari kontrak kerjasama selama tahun 2023 (periode lifting Januari s.d. Desember) pada Kontraktor Kerja Sama (KKKS):

Lifting Oil	MBBLS	219.250
Lifting Gas	MMSCF Jumlah	1.902.011
Oil Price	USD	81,81
Gas Price	USD/harga rata-rata	7,00
Gross Revenue	(USD 000)	33.242.991
First Trance Petroleum	(USD 000)	3.142.419
Total Recoverable	(USD 000)	7.135.432
Equity to be Split	(USD 000)	14.366.874
Government Share *)	(USD 000)	12.921.874
Lifting Pemerintah	(USD 000)	17.204.637
Net Underlifting Pemerintah	(USD 000)	176.587

*) berdasarkan % Split Production Sharing Contract

Keterangan:

MBBLS = 000 Barels
MSCEF = 000 Square Cubic Feet
ICP = Indonesian Crude Price

Data tersebut di atas berasal dari resume rekapitulasi FQR Preliminiary Kuartal IV 2023 dan FMR 2023 yang masih belum final karena masih dalam proses reviu oleh SKK Migas.

UAP BUN TK DJPK

A. Peraturan Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok

Pengelolaan pajak rokok tahun 2023 berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 juncto PMK Nomor 102/PMK.07/2015 juncto PMK Nomor 41/PMK.07/2016 juncto PMK

Nomor 11/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan.
Sejak 22 Desember 2023 pengelolaan pajak rokok mengacu pada PMK Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok

B. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok

Sesuai dengan Bab VI tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Rokok, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran Pajak Rokok yang dihitung berdasarkan:

1. Kelebihan pembayaran Pajak Rokok karena kesalahan penghitungan;
2. Pengembalian Cukai Rokok; atau
3. Pajak Rokok yang telah dibayar oleh Wajib Pajak yang bukan merupakan objek Pajak Rokok yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang.

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok tersebut dilakukan secara tunai atau dengan cara diperhitungkan pada pembayaran Pajak Rokok berikutnya. Atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok oleh Wajib Pajak Rokok, Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan dan memeriksa jangka waktu berlaku Tanda Bukti Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok. Dalam hal hasil penelitian telah sesuai, Kepala Kantor Bea dan Cukai menyampaikan surat permintaan kepada Kepala KPPN untuk menerbitkan SKTB dilampiri BPN. Setelah diterbitkannya SKTB oleh Kepala KPPN, Kepala Kantor Bea dan Cukai menyampaikan surat rekomendasi pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok kepada DJPK dengan dilampiri dokumen permohonan dari Wajib Pajak Rokok, tanda bukti kelebihan pembayaran Pajak Rokok, dan SKTB. Kemudian berdasarkan surat rekomendasi tersebut, DJPK menerbitkan SKP-KP2R. Atas dasar SKP-KP2PR yang diterbitkan, pejabat perbendaharaan Pajak Rokok menyelesaikan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok melalui KPPN Jakarta II. Sampai dengan akhir periode Tahun Anggaran 2023, terdapat 4 (empat) pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok.
Selama Tahun Anggaran 2023, terdapat empat pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok dengan rincian sebagai berikut.

Penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran kepada Wajib Pajak Rokok a.n. PT. Friendship Jember Abadi yang didasarkan pada surat Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember dan ditindaklanjuti oleh DJPK sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

NO	TRIWULAN	DOKUMEN		NAMA PERUSAHAAN	NILAI
		TGL	NOMOR		
1	I	10-03-2023	82002T/999250/2023	PT FRIENDSHIP JEMBER ABADI	16.560.000
TOTAL					16.560.000

Jumlah penyelesaian pengembalian tersebut diperhitungkan dengan penerimaan Pajak Rokok yang menjadi hak daerah pada periode penyetoran berikutnya. Untuk pengembalian kepada PT. Friendship

Jember Abadi sebesar Rp16.560.000,00 diperhitungkan dengan penerimaan Triwulan I Tahun Anggaran 2023.

Penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran kepada Wajib Pajak Rokok a.n. PR Mubarok Jaya Abadi yang didasarkan pada surat Kepala KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus dan ditindaklanjuti oleh DJPK sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

NO	TRIWULAN	DOKUMEN		NAMA PERUSAHAAN	NILAI
		TGL	NOMOR		
1	III	29/08/2023	82029T/999250/2023	PR MUBAROK JAYA ABADI	18.691.200
TOTAL					18.691.200

Jumlah penyelesaian pengembalian tersebut diperhitungkan dengan penerimaan Pajak Rokok yang menjadi hak daerah pada periode penyetoran berikutnya. Untuk pengembalian kepada PR Mubarok Jaya Abadi sebesar Rp18.691.200 diperhitungkan dengan penerimaan Triwulan III Tahun Anggaran 2023.

Penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran kepada Wajib Pajak Rokok a.n. PT Sembilan Matahari Sakti yang didasarkan pada surat Kepala KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus dan ditindaklanjuti oleh DJPK sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

NO	TRIWULAN	DOKUMEN		NAMA PERUSAHAAN	NILAI
		TGL	NOMOR		
1	IV	22/11/2023	82045T/999250/2023	PT. SEMBILAN MATAHARI SAKTI	100.350.000
TOTAL					100.350.000

Jumlah penyelesaian pengembalian tersebut diperhitungkan dengan penerimaan Pajak Rokok yang menjadi hak daerah pada periode penyetoran berikutnya. Untuk pengembalian kepada PT Sembilan Matahari Sakti sebesar Rp100.350.000,00 diperhitungkan dengan penerimaan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023.

Penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran kepada Wajib Pajak Rokok a.n. PT. Permona Cipta Persada yang didasarkan pada surat Kepala KPPBC TMP C Pematangsiantar dan ditindaklanjuti oleh DJPK sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

NO	TRIWULAN	DOKUMEN		NAMA PERUSAHAAN	NILAI
		TGL	NOMOR		
1	IV	22/11/2023	82044T/999250/2023	PT. PERMONA CIPTA PERSADA	35.548.800
TOTAL					35.548.800

Jumlah penyelesaian pengembalian tersebut diperhitungkan dengan penerimaan Pajak Rokok yang menjadi hak daerah pada periode penyetoran berikutnya. Untuk pengembalian kepada PT Permona Cipta Persada sebesar Rp35.548.800,00 diperhitungkan dengan penerimaan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023.

C. Penggunaan Satker 999250 untuk Penerimaan dan Penyetoran Pajak Rokok

Perubahan satker 999247 menjadi satker 999250 dilakukan secara bertahap mulai tahun 2015 karena dalam pelaksanaannya penerimaan Pajak Rokok masih menggunakan satker 999247 sedangkan satker 999250 digunakan untuk penyetoran Pajak Rokok.

Penggunaan satker 999250 pada tahun 2016 dioptimalkan dengan membelokkan secara otomatis/tersistem terhadap penerimaan Pajak Rokok dari satker 999247 ke satker 999250 dimulai pada Oktober 2016 sehingga satker 999250 dapat menyajikan semua informasi penerimaan Pajak Rokok.

D. Tindak Lanjut atas Temuan BPK

Tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan tentang adanya perbedaan data penerimaan Pajak Rokok tahun 2015 menurut DJBC (SAC-S) sebesar Rp12.254.041.168.540 dan menurut DJPB (SPAN) sebesar Rp13.953.934.936.936 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp1.699.893.768.396), telah ditindaklanjuti dengan melakukan pembahasan antara DJPK, DJPB, DJBC dan Itjen. Kemudian disepakati akan dilakukan penelusuran perbedaan data tersebut dengan mengacu pada NTPN. Selanjutnya melalui surat DJPK nomor S-17/PK.3/2017 tanggal 14 Februari 2017 hal Permintaan Penjelasan Data Pajak Rokok TA 2015 dan 2016 yang telah ditindaklanjuti dengan surat Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai nomor S-552/BC.04/2017 tanggal 21 Desember 2017 hal Penyampaian hasil Rekonsiliasi Data Pajak Rokok Tahun 2015 disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. DJBC telah mengirimkan surat nomor S-304/BC.04/2017 tanggal 31 Juli 2017 hal Permintaan Penjelasan Data Pajak Rokok tahun 2015 kepada beberapa KPPBC yang menangani Pajak Rokok.
2. DJBC telah melakukan rekonsiliasi Pajak Rokok tahun 2015 kepada beberapa KPPBC secara langsung dengan mendatangi kantor tersebut serta melakukan wawancara dengan pegawai yang menangani Pajak Rokok di kantor tersebut.
3. Didapatkan hasil rekonsiliasi sebagai berikut:
   a. Dari 124 NTPN yang ada pada aplikasi SPAN namun tidak ada dalam aplikasi SAC-S telah ditemukan dan terkonfirmasi sebanyak 110 NTPN.
   b. Dari 21 NTPN yang ada pada aplikasi SACS namun tidak ada dalam aplikasi SPAN telah ditemukan dan terkonfirmasi sebanyak 21 NTPN.
   c. Dari 24 NTPN yang memiliki nilai setoran yang sama dengan frekuensi penyetoran pada tanggal penyetoran yang sama lebih dari 1 kali telah terkonfirmasi sebanyak 24 NTPN.
   d. Dari 13 data pajak rokok yang memiliki NTPN yang sama tetapi nominal penyetorannya berbeda telah terkonfirmasi sebanyak 13 data.
   e. Dari 6 transaksi pajak rokok yang double dan memiliki perbedaan pada detail transaksinya telah terkonfirmasi sebanyak 1 transaksi.
4. Terdapat kendala dalam pencarian data pajak rokok dikarenakan penelusuran data hanya dari nama penyetor, tidak menyebutkan nama KPPBC-nya. Hal tersebut mengakibatkan data pajak rokok tidak ditemukan.
5. Data pajak rokok yang belum ditemukan masih dalam proses pencarian dan menunggu konfirmasi dari KPPBC terkait.

Pada Semester I Tahun Anggaran 2018 telah dilakukan pembahasan bersama antara DJPK, DJPB, DJBC, dan Itjen Kemenkeu pada tanggal 23 Mei 2018 di Ruang Rapat II, Gedung Papua Lantai 4, DJBC sesuai dengan undangan Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai nomor UND-148/BC.04/2018 tanggal 22

Mei 2018 perihal Undangan Rapat Pembahasan dan Penelahaan Bersama. Pada rapat tersebut telah disimpulkan bahwa dari 17 transaksi pajak rokok yang belum ditemukan sampai akhir tahun 2017, telah ditemukan dokumen sumber dari 6 transaksi tersebut. Sehingga total sisa selisih data tahun 2015 adalah sebanyak 11 transaksi dengan jumlah pajak rokok sebesar Rp22.705.652.400. Untuk transaksi yang belum ditemukan akan dilakukan konfirmasi ke KPPBC/Perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Nomor ND-69/BC.04/2019 tanggal 25 Januari 2019 hal Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Rekonsiliasi Data Pajak Rokok Tahun 2015 dapat disampaikan bahwa:

1. DJBC telah melakukan rekonsiliasi Pajak Rokok Tahun 2015 dengan meminta penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) secara langsung (mendatangi kantor tersebut) ataupun tidak langsung.
2. Telah ditemukan hasil rekonsiliasi sebagai berikut:
   a. Dari 25 NTPN yang ada pada aplikasi SPAN namun tidak ada dalam aplikasi SAC-S telah ditemukan dan terkonfirmasi sebanyak 24 NTPN dan tersisa 1 NTPN yang belum terkonfirmasi.
   b. Dari 9 NTPN yang ada pada aplikasi SAC-S namun tidak ada di aplikasi SPAN telah ditemukan dan terkonfirmasi sebanyak 9 NTPN.
   c. Dari 2 data pajak rokok yang memiliki NTPN berbeda antara aplikasi dan aplikasi SAC-S (indikasi salah input) namun nominal penyetorannya sama, telah terkonfirmasi sebanyak 2 data.
   d. Dari 5 transaksi pajak rokok yang double entry dan memiliki perbedaan pada detail transaksinya telah terkonfirmasi sebanyak 5 transaksi.
3. Bahwa tersisa 1 transaksi yang belum ditemukan dengan jumlah sebesar Rp21,59 Juta atau sebesar 01% dari jumlah nilai temuan seluruhnya (Rp1,69 Triliun). Dalam rangka penyelesaian adanya 1 (satu) sisa transaksi yang belum ditemukan tersebut sudah beberapa kali dibahas bersama antara DJPK dengan Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan, namun belum bisa ditemukan penyelesaiannya.

E. Rekonsiliasi Data Penerimaan Pajak Rokok

Rekonsiliasi Data Penerimaan Pajak Rokok periode Tahun Anggaran 2023 antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui aplikasi Ms Teams dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi BA-1/PK.5/TR.4/2024 tanggal 27 Februari 2024.

Rekonsiliasi dilaksanakan untuk menyesuaikan informasi catatan penerimaan Pajak Rokok yang disediakan oleh SPAN/MPN-DJPB dengan dokumen pendukung pemungutan yang tercatat dalam catatan penerimaan Pajak Rokok yang disediakan oleh SACS-DJBC. Sumber data yang digunakan antara lain berupa rekapitulasi data penerimaan Pajak Rokok yang disampaikan DJPB ke DJPK setiap triwulan serta data pendukung rincian transaksi yang diunduh melalui SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) dan MPN (Modul Penerimaan Negara) dan rekapitulasi data penerimaan Pajak Rokok yang disampaikan DJBC ke DJPK setiap bulan serta data pendukung rincian transaksi yang ditarik dari SACS (Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi).

Rincian rekapitulasi data penerimaan Pajak Rokok dari DJPB dan DJBC periode 1 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Bulan	SACS (DJBC) (rupiah)	SPAN/MPN (DJPB) (rupiah)
Januari	1.816.330.012.249	1.816.330.012.249
Februari	2.378.417.075.310	2.378.417.075.310
Maret	1.274.175.440.284	1.274.175.440.284
April	1.700.203.358.456	1.700.203.358.456
Mei	1.748.292.867.407	1.748.292.867.407
Juni	1.247.392.557.115	1.247.392.557.115
Juli	853.383.789.658	853.383.789.658
Agustus	1.554.296.860.544	1.554.296.860.544
September	1.773.272.296.802	1.773.272.296.802
Oktober	1.858.349.303.649	1.858.349.303.649
November	1.680.198.441.331	1.680.348.966.331
Desember	3.331.819.653.037	3.331.819.653.037
Total	**21.216.131.655.842**	**21.216.282.180.842**

Total rekapitulasi penerimaan Pajak Rokok berdasarkan data SACS-DJBC adalah sebesar Rp21.216.131.655.842,00 sedangkan total rekapitulasi penerimaan Pajak Rokok berdasarkan data SPAN/MPN-DJPB sebesar Rp21.216.282.180.842,00 atau terdapat selisih sebesar Rp150.525.000,00.

Terkait hal tersebut, DJBC telah melakukan update status billing pada SACS melalui Nota Dinas Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Nomor: ND-198/BC.04/2024 tanggal 25 Februari 2024 hal Tindak Lanjut atas Hasil Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2023 sehingga penyetoran sebesar Rp150.525.000,00 atas NTPN 1A1BA4SSJRKTUSQR sudah tercatat pada SACS.

Berdasarkan hal tersebut di atas, telah disepakati bahwa nilai penerimaan Pajak Rokok periode Tahun Anggaran 2023 yang dimuat dalam SACS dan SPAN telah sesuai dengan dokumen sumbernya, yaitu sebesar Rp21.216.282.180.842.

F. Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan

Berdasarkan ketentuan PMK Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan yang merupakan amanat dari Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi penerimaan yang bersumber dari Pajak Rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota. Mekanisme pemotongan penerimaan Pajak Rokok untuk disetorkan ke rekening BPJS Kesehatan mengacu kepada ketentuan Pasal 6 PMK Nomor 128/PMK.07/2018 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Apabila anggaran kontribusi Jaminan Kesehatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang tercantum dalam kompilasi berita acara yang diserahkan oleh pemerintah provinsi, sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) atau lebih, tidak dilakukan pemotongan Pajak Rokok;
b. Apabila anggaran kontribusi Jaminan Kesehatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang tercantum dalam kompilasi berita acara yang diserahkan oleh pemerintah provinsi, kurang dari 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen), pemotongan Pajak Rokok dilakukan sebesar selisih kurang dari 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen); atau

c. Apabila pemerintah provinsi tidak menyampaikan kompilasi berita acara kesepakatan dikenakan pemotongan Pajak Rokok sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen).

Berita acara kesepakatan memuat kesepakatan antara pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan mengenai besaran penerimaan Pajak Rokok yang akan dipotong sebagai bentuk kontribusi daerah dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional. Berita acara kesepakatan dari daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi dikompilasi oleh pemerintah provinsi untuk kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pemotongan dilaksanakan sesuai dengan kompilasi berita acara kesepakatan untuk daerah yang memenuhi ketentuan huruf b dan huruf c Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 pada setiap periode penyetoran Pajak Rokok ke RKUD Provinsi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 beserta perubahannya.

Selanjutnya terkait dengan mekanisme pemotongan dalam penyetoran PR sebagai berikut:

a. Pagu alokasi Desember TA 2022 dan pagu alokasi TW I TA 2023, dibagi secara proporsional berdasarkan data jumlah penduduk kepada provinsi.

b. Apabila terdapat selisih kurang atas kewajiban jamkes daerah TA 2022 dalam Kompilasi BAK akan dipotong dari realisasi penerimaan PR periode Desember TA 2022. Dalam hal selisih kurang atas kewajiban jamkes daerah TA 2022 lebih kecil dari perhitungan realisasi Desember 2022 maka dipotong sebesar selisih kurang, dan apabila selisih kurang atas kewajiban jamkes daerah TA 2022 lebih besar dari penghitungan realisasi Desember 2021 maka dipotong sebesar realisasi Desember 2021, dan atas sisa pemotongan akan diperhitungkan dalam TW I 2023.

c. Apabila terdapat selisih kurang atas kewajiban jamkes daerah TA 2022 dalam Kompilasi BAK akan dipotong dari realisasi penerimaan PR TW I TA 2022 dengan memperhitungkan sisa pemotongan Desember 2022. Dalam hal selisih kurang lebih kecil dari 37,5% perhitungan realisasi TW I maka dipotong sebesar selisih kurang dan apabila selisih kurang lebih besar dari 37,5% perhitungan realisasi TW I maka dipotong sebesar 37,5% dari realisasi TW I dan atas sisa pemotongan akan diperhitungkan dalam TW II sampai dengan TW IV TA 2023.

d. Untuk pemda yang tidak menganggarkan Anggaran Jamkesda dalam Kompilasi BAK TA 2022 akan dilakukan pemotongan sebesar 37,5% dari realisasi penerimaan PR TW I TA 2023.

Ringkasan besaran pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan masing-masing Provinsi disajikan pada Lampiran LDCPL4.

UAP BUN TK DJKN

A. ABMA/T

1. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA TERKAIT CAPAIAN KINERJA PENYELESAIAN ASET BEKAS MILIK ASING/TIONGHOA SAMPAI DENGAN TAHUN 2023

Atas peran Tim Penyelesaian dan Tim Asistensi Daerah ABMA/T, pada Tahun 2023 sebanyak 10 aset telah diselesaikan status hukum secara tuntas dan 6 aset diselesaikan sebagian status hukumnya

Sampai dengan Tahun 2023, dari total ABMA/T sebanyak 1.020 dalam Lampiran PMK Nomor 182/PMK.06/2021, sebanyak 560 aset telah diselesaikan status hukumnya dengan tuntas, sehingga masih terdapat 460 aset yang belum diselesaikan yang terdiri dari 83 aset belum diselesaikan sebagian status hukumnya dan 377 aset belum diselesaikan status hukum seluruhnya.

2. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA TERKAIT ASET LAINNYA

Sejak awal pengelolaan ABMA/T sampai dengan Tahun 2023 terdapat 72 Keputusan Menteri Keuangan mengenai penyelesaian ABMA/T dengan cara dilepaskan kepada Pihak Ketiga dengan pembayaran kompensasi.

3. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA TERKAIT RAPAT PEMBAHASAN

Sebagai upaya dalam penyelesaian ABMA/T, Tim Penyelesaian melaksanakan agenda rapat rutin pembahasan yang telah dilakukan selama dari awal tahun hingga Tahun 2023.

4. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA TERKAIT PENAMBAHAN JUMLAH ASET BEKAS MILIK ASING/TIONGHOA DALAM LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 182/PMK.06/2021

Sebagaimana Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020, dijelaskan bahwa aset yang dilakukan penyelesaian tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa. Selanjutnya, dalam rangka mengakomodir penyelesaian ABMA/T telah dilakukan perubahan terhadap Lampiran PMK 62/PMK.06/2020 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa dengan menambahkan lima ABMA/T yang belum dieselesaikan secara keseluruhan (penyelesaian sebagian), yakni:

a. Kantor Dispenda Kodya Dati II Bogor-TK/SD/SMP/SMA/ Akademi Management, berlokasi di Kota Bogor, Jawa Barat.
b. SDN Waluyo I dan Perumahan/Pertokoan, berlokasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
c. SDN VII, IX, XIV dan XVI Karawang, Masyarakat, Pemerintah Daerah untuk fasilitas Jalan, berlokasi di Karawang, Jawa Barat.
d. SMA Negeri Blitar, SD Negeri Sananwetan, berlokasi di Kotamadya Blitar, Jawa Timur.
e. SD Negeri Jatituri 1 dan 3, Madrasah Aliyah Negeri, TK Pertiwi, SMP/SMA/SMEA Kodya Blitar, Perkoveri dan Makoramil, berlokasi di Kotamadya Blitar, Jawa Timur.

Atas dasar tersebut, telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa, yang mengakibatkan terjadinya pemutakhiran data ABMA/T yang sebelumnya berjumlah 1.015 aset menjadi 1.020 aset.

5. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA TERKAIT ASET BEKAS MILIK ASING/TIONGHOA YANG MASIH DALAM PROSES PENYELESAIAN DENGAN CARA PELEPASAN KEPADA PIHAK KETIGA

ABMA/T yang telah diketahui nilainya dan ditetapkan besaran kompensasinya berdasarkan Surat Menteri Keuangan selanjutnya diproses tindak lanjut dengan prosedur pelepasan ABMA/T dengan tahapan meliputi: pemberitahuan/penagihan kompensasi, konfirmasi/klarifikasi penerimaan Negara

(bila ada), dan proses penerbitan penetapan keputusan pelepasan ABMA/T (bila memenuhi syarat). Adapun ABMA/T dengan penetapan besaran kompensasi yang masih berlaku (aktif) dan dalam proses tindak lanjut penyelesaian/pelepasan yang dilakukan oleh Direktorat PKN sampai dengan Tahun 2023.

6. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA TERKAIT TINDAK LANJUT REKOMENDASI ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS PENGELOLAAN ASET BEKAS MILIK ASING/TIONGHOA

Sehubungan dengan hasil Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara dan/atau Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh BPK-RI terkait pengelolaan ABMA/T, terdapat Temuan Hasil Pemeriksaan atas Aset Bekas Milik Asing/Cina pada DJKN Tahun 2007 yang menyisakan 2 (dua) butir rekomendasi masih berstatus dalam proses tindak lanjut.

7. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA TAHUN 2021 TERKAIT PENGELOLAAN ABMA/T

Sehubungan dengan hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Undang-Undang Bendahara Umum Negara Tahun 2021 sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 49.b/LHP/XV/05/2022 tanggal 28 Mei 2022, terdapat temuan yang berkaitan dengan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa dengan dua rekomendasi yang hingga saat ini masih dalam proses tindak lanjut.

B. Aset Eks Pertamina

1. PEMANFAATAN BMN OLEH PT PERTAMINA C.Q. PT PERTAMINA EP

Sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-23/MK.6/2009 tanggal 21 Januari 2009, Menteri Keuangan menanggapi surat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor 1105/C00000/2008-S0 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Usulan Penyelesaian Isu-Isu Neraca Pembuka PT Pertamina (Persero) Tindak Lanjut Rapat Bali 28 dan 29 Juli 2008, Menteri Keuangan antara lain menyetujui skema sewa atas pemanfaatan aset-aset Eks KKKS Pertamina senilai Rp16,2 Triliun, dengan mengeluarkan objek sewa berupa lahan dan sumur yang dimanfaatkan langsung oleh PT Pertamina (Persero) sesuai kontrak Wilayah Kerja dengan BP Migas (SKK Migas), sehingga pengakuan beban sewa sementara untuk Barang Milik Negara Eks Aset KKKS Hulu sebesar Rp16,2 Triliun adalah sebesar Rp9,472 Triliun. Untuk itu, perlu dilakukan pemilahan aset-aset eks KKKS Pertamina sebagai objek sewa dalam rangka penghitungan sewa atas pemanfaatan Barang Milik Negara Eks Aset KKKS.

Menindaklanjuti skema sewa tersebut, melalui surat Nomor: S-155/KN.3/2014 tanggal 5 Juni 2014 perihal Temuan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun 2013, Direktur KND meminta agar PT Pertamina (Persero) dan/atau Pertamina EP menyelesaikan pelunasan tunggakan utang sewa BMN Eks Aset Pertamina.

Melalui surat Nomor: SRT-0365/SKKC0000/2014/S4 tanggal 29 September 2014 perihal Sewa BMN Eks Pertamina Rp3,03 Triliun, SKK Migas berkeberatan apabila pengembalian biaya sewa dilakukan dengan mekanisme cost recovery.

Menjawab surat dari SKK Migas, Menteri Keuangan kemudian bersurat kepada Kepala SKK Migas melalui surat Nomor: S-837/MK.06/2014 tanggal 12 Desember 2014 perihal Piutang Sewa BMN oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP yang pada pokoknya menyampaikan bahwa SKK Migas memperhitungkan Biaya Sewa BMN sebagai biaya operasi PT Pertamina EP yang dapat dikembalikan sesuai ketentuan perundangan.

Pada tanggal 30 Desember 2014, SKK Migas melalui surat Nomor: SRT-1294/SKKO0000/2014/S4 bersurat kepada Menteri Keuangan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa:

Pada prinsipnya SKK Migas menyetujui sewa aset eks Pertamina dapat dibebankan sebagai biaya operasi (cost recovery) sepanjang aset tersebut digunakan dalam operasi hulu migas.

Sebagai tindak lanjut, SKK Migas telah meminta konfirmasi kepada PT Pertamina EP melalui surat Nomor: SRT-2498/SKKC2000/2014/S4 tanggal 17 Desember 2014 perihal Sewa Aset Eks Pertamina atas nilai aset yang digunakan oleh PT Pertamina EP.

PT Pertamina EP melalui surat Nomor 127/EP4000/2014-S4 tanggal 24 Desember 2014 perihal Sewa Aset Eks Pertamina memberikan konfirmasi bahwa berdasarkan hasil inventarisasi aset eks BMN Pertamina yang telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor 194/C00000/2011-S0 tanggal 29 Maret 2011 perihal Sewa Aset Eks Pertamina, maka nilai aset BMN Eks Pertamina kategori equipment, bangunan dan aset lainnya yang saat ini digunakan oleh PT Pertamina EP sebesar Rp6.630.929.353.338,00.

Berdasarkan hal tersebut, maka SKK Migas meminta agar pengenaan sewa didasarkan pada hasil konfirmasi PT Pertamina EP sebagai Pengguna Barang Aset Eks KKKS Pertamina dengan nilai sebesar Rp6.630.929.353.338,00.

Hal ini sejalan juga dengan arahan Badan Pemeriksa Keuangan dalam rapat tripartit antara BPK, Kementerian Keuangan dan SKK Migas pada tanggal 13 November 2015 bahwa atas BMN Eks Aset Pertamina yang dikuasai oleh Pertamina EP dikenakan sewa dan perlu dibuat perjanjian sewa antara Pemerintah (DJKN) dengan PT Pertamina EP.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pertamina EP telah menyelesaikan pembayaran sewa sampai dengan per tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp2.745.619.185.367,00 dan melalui surat Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Nomor: S-21/KN.3/2016 tanggal 21 Januari 2016 perihal Draft Perjanjian Sewa Menyewa BMN Eks Pertamina, maka disusun dan ditandatangani perjanjian sewa menyewa Nomor PRJ-3/MK.6/2016 tanggal 20 September 2016 dengan menggunakan dasar perhitungan sewa sebesar Rp6.630.929.353.338,00.

Terhadap selisih aset dengan nilai sebesar Rp2.841.878.588.184,00, sesuai Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2015 kepada Menteri Keuangan, Direktorat KND telah dilakukan tindak lanjut dengan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi aset lanjutan berupa penelitian lapangan antara DJKN, PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP.

Berdasarkan Berita Acara Pemetaan antara Dit KND dan PT Pertamina EP tahun 2016 s.d. 2020, telah selesai dilaksanakan pemetaan terhadap selisih aset yang memerlukan klarifikasi sebanyak

13.218 unit dengan nilai Rp1,79 triliun dan diperoleh penambahan nilai aset yang menjadi objek sewa sebesar Rp612.413.874.473,00.

Berdasarkan hal tersebut telah disampaikan surat kepada Pertamina EP Nomor S-514/KN.5/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Konfirmasi Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina dan Nomor S-2329/KN.5/2021 tanggal 18 November 2021 perihal Penyesuaian Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina Oleh PT Pertamina EP yang intinya menyampaikan kekurangan sewa yang harus dibayar oleh PT Pertamina setelah adanya pemetaan.

Mempertimbangkan prinsip konservatism dalam akuntansi, yaitu prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana DJKN mengakui segera potensi adanya piutang sewa yang tidak tertagih, maka dasar perhitungan pendapatan PNBP Lainnya menggunakan nilai Rp6.630.929.353.338,00.

Telah dilakukan penandatanganan perjanjian sewa antara Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Direktur Utama PT Pertamina EP Nomor PRJ-1/MK.6/2022 Nomor 001/PEP00000/2022-S0 tanggal 27 Desember 2022. Dengan adanya kesepakatan perjanjian sewa tersebut dimana menggunakan angka dasar sewa sebesar Rp6.630.929.353.338,00 dengan jangka waktu perjanjian sewa selama 32 (tiga puluh dua) tahun terhitung sejak tanggal 17 September 2003 dan berakhir tanggal 16 September 2035, maka piutang yang timbul karena adanya selisih pengenaan angka dasar sewa dilakukan koreksi dari semula Rp1.176.715.352.919,00 menjadi Rp0,00.

2. TINDAK LANJUT TEMUAN BPK TERKAIT ASET EKS PERTAMINA

a. Tindak Lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2018

Sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018, terdapat temuan terkait BMN eks Pertamina, yaitu "Pengendalian atas Pemanfaatan BMN KKKS dan Pencatatan Aset Eks Pertamina Belum Tertib". BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar melakukan penelusuran dan menetapkan status aset Eks Pertamina yang belum dilakukan IP atau belum dapat ditentukan nilai wajarnya.

1) Tindak Lanjut telah dilaksanakan dengan kebijakan yang disepakati dengan BPK adalah Menteri Keuangan akan memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara agar menelusuri BMN yang belum dilakukan IP dan belum dapat ditentukan nilai wajarnya berdasarkan Laporan Hasil IP tahun 2012 dan mengungkapkan status aset yang belum dilakukan IP dan belum dapat ditentukan nilai wajarnya tetap berstatus BMN sebagaimana ditetapkan dalam KMK nomor 92/KMK.06/2008.
2) Atas temuan dan rekomendasi BPK tersebut, progress tindak lanjut yang telah dilakukan oleh DJKN sampai dengan 31 Desember 2023 Tahun 2023 adalah:
   Berdasarkan hasil penelusuran, telah terpetakan BMN Eks Pertamina yang menjadi objek IP sejumlah 42.989 berdasarkan data hasil appraisal Uljatek saat aset tersebut dilimpahkan kepada Kementerian Keuangan.
   Sampai dengan 31 Desember 2023, BMN Eks Pertamina yang telah dilakukan IP adalah 36.811 unit. Nilai wajar hasil IP tersebut telah disajikan dalam LK SATK BMN Eks Pertamina. Adapun untuk sisanya 6.178 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp2.201.210.688.990,00 akan dilakukan inventarisasi dan penilaian secara bertahap, dengan memprioritaskan objek penilaian berupa

tanah dan teknis pelaksanaan IP-nya lebih mudah serta mempertimbangkan anggaran yang tersedia dan memperhatikan pembatasan sosial terkait pandemi Covid-19.
Permasalahan ini kembali menjadi temuan pada pemeriksaan BPK tahun 2020, sehingga upaya penyelesaiannya menjadi satu kesatuan dengan upaya penyelesaian temuan tahun 2020.

b. Tindak Lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2019

Sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2019, terdapat temuan terkait BMN eks Pertamina, yaitu "Terdapat perbedaan penghitungan Piutang atas sewa Aset Eks Pertamina antara PT Pertamina EP dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)".
BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku BUN untuk memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara agar menyusun perjanjian pemanfaatan BMN Eks Pertamina dengan PT Pertamina EP sesuai dengan hasil peninjauan lapangan untuk menetapkan nilai BMN Eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina EP serta menyesuaikan nilai piutang yang tercatat berdasarkan perjanjian yang telah disusun.
Atas temuan dan rekomendasi BPK tersebut, progress tindak lanjut yang telah dilakukan oleh DJKN sampai dengan 31 Desember 2023 adalah:
Adapun progres sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut:

1) Berdasarkan Berita Acara Pemetaan antara Dit KND dan PT Pertamina EP tahun 2016 s.d. 2020, telah selesai dilaksanakan pemetaan terhadap selisih aset yang memerlukan klarifikasi sebanyak 13.218 unit dengan nilai Rp1,79 triliun dan diperoleh penambahan nilai aset yang menjadi objek sewa sebesar Rp612.413.874.473,00.

2) Berdasarkan hal tersebut telah disampaikan surat kepada Pertamina EP Nomor S-514/KN.5/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Konfirmasi Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina dan Nomor S-2329/KN.5/2021 tanggal 18 November 2021 perihal Penyesuaian Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina Oleh PT Pertamina EP yang intinya menyampaikan kekurangan sewa yang harus dibayar oleh PT Pertamina setelah adanya pemetaan.

3) PT Pertamina menyampaikan tanggapan melalui surat Nomor 0169/PEP00000/2021-S0 tanggal 20 April 2021 sebagai berikut:

4) Pada saat melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Kegiatan Operasional Perusahaan Dalam Rangka Pengelolaan Hulu Migas Tahun 2017 s.d Semester I 2019 pada Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaan terkait, BPK RI mengeluarkan rekomendasi agar hasil Phisical Check BMN Pertamina diteruskan kepada pihak terkait yaitu PT Pertamina (Persero) dan DJKN Kemenkeu. BPK menyampaikan bahwa Pertamina EP berpotensi menanggung biaya pembayaran sewa yang lebih besar dari yang seharusnya karena tidak segera mengajukan pemutahiran daftar BMN aset Eks Pertamina sebagai dasar peninjauan kembali perhitungan biaya sewa BMN.

5) Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi BPK dimaksud, PT Pertamina EP menyampaikan Hasil Phisical Check Aset (PCA) 2019 sebagai berikut:

Kelas Aset Objek Sewa	Digunakan	Tidak Digunakan	Total
Bangunan	502.296.425.065	98.814.481.867	601.110.906.932
Equipment	4.157.250.251.287	1.731.901.048.119	5.889.151.299.406
Lain-lain	94.463.625.000	46.203.522.000	140.667.147.000
Subtotal Objek Sewa	4.754.010.301.352	1.876.919.051.986	6.630.929.353.338

6) Berdasarkan hasil PCA 2019 tersebut, aset yang digunakan oleh PT Pertamina EP tidak lagi sebesar Rp6.630.929.353.338, melainkan sebesar Rp4.754.010.301.352.

7) Menindaklanjuti hal tersebut, telah dilakukan pembahasan bersama dengan PT Pertamina EP sebanyak dua kali dan disepakati untuk dilakukan pembahasan lanjutan dengan melibatkan pihak lain yang terkait.

8) Terkait dengan koreksi besaran Piutang Sewa BMN eks Pertamina dari semula Rp1.176.715.352.919,00 menjadi Rp349.267.287.782,00 pada laporan keuangan, telah dimintakan permintaan pendapat melalui nota dinas Direktur PKNSI Nomor 2755/KN.5/2021 tanggal 17 November 2021 kepada Inspektorat IV dan Nomor 2756/KN.5/2021 tanggal 17 November 2021 kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yang pada intinya meminta pendapat apakah surat kepada Pertamina EP perihal Penyesuaian Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina dapat dijadikan dasar untuk dilakukan koreksi piutang.

9) Menanggapi permintaan pendapat tersebut, Inspektorat IV berpendapat agar Dit. PKNSI segera melakukan pembahasan dengan PT. Pertamina EP untuk menyepakati hasil proses identifikasi dan verifikasi atas BMN yang dimanfaatkan dan menyusun perjanjian pemanfaatan BMN berdasarkan hasil kesepakatan dengan PT. Pertamina EP. Mengingat Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 16 Akuntansi Piutang Berbasis Akrual mengatur pencatatan piutang pemanfaatan BMN pada neraca berdasarkan naskah perjanjian sewa.

10) Sehubungan dengan adanya perbedaan Penghitungan Besaran Dasar Sewa Aset Eks Pertamina telah dilakukan rapat via Zoom antara DJKN dengan Pihak PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP pada tanggal 24 April 2022, dimana berkaitan dengan adanya perbedaan besaran tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk kembali kepada angka dasar sewa sesuai kesepakatan semula yaitu sebesar Rp6.630.929.353.338,00 dan akan dilakukan koordinasi di internal kedua belah pihak.

11) Telah dilakukan pembahasan draft perjanjian sewa BMN Eks Pertamina pada 9 September 2022 sesuai undangan dari Direktur Regional 2 PT Pertamina EP melalui surat undangan nomor 1058/PEP00000/2022-S0 tanggal 07 September 2022. Selanjutnya, pada tanggal 30 September 2022 telah dilakukan pembahasan lanjutan draft perjanjian sewa bersama PT Pertamina EP dan masih akan diagendakan pembahasan lanjutan untuk finalisasi draft perjanjian tersebut. Sehubungan dengan jangka waktu sewa, telah dimintakan pendapat kepada Direktorat PKKN melalui nota dinas Direktur PKN Nomor ND-1505/KN.4/2022 tanggal 20 September 2022 hal Permintaan Pendapat terkait Perjanjian Sewa Barang Milik Negara Eks Aset Pertamina.

12) Telah dilakukan penandatanganan perjanjian sewa antara Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Direktur Utama PT Pertamina EP Nomor PRJ-1/MK.6/2022 Nomor 001/PEP00000/2022-S0 tanggal 27 Desember 2022. Dengan adanya kesepakatan perjanjian sewa tersebut dimana menggunakan angka dasar sewa sebesar Rp6.630.929.353.338,00 dengan jangka waktu perjanjian sewa selama 32 (tiga puluh dua) tahun terhitung sejak tanggal 17 September 2003 dan berakhir tanggal 16 September 2035, maka piutang yang timbul karena adanya selisih pengenaan angka dasar sewa dilakukan koreksi dari semula Rp1.176.715.352.919,00 menjadi Rp0,00.

Atas rekomendasi ini telah diusulkan selesai pada pembahasan tidak lanjut dengan BPK di awal tahun 2023.

c. Tindak Lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2019

Sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2019, terdapat temuan terkait BMN eks Pertamina, yaitu "Terdapat perbedaan penghitungan Piutang atas sewa Aset Eks Pertamina antara PT Pertamina EP dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)".

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku BUN untuk memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara agar menyusun perjanjian pemanfaatan BMN Eks Pertamina dengan PT Pertamina EP sesuai dengan hasil peninjauan lapangan untuk menetapkan nilai BMN Eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina EP serta menyesuaikan nilai piutang yang tercatat berdasarkan perjanjian yang telah disusun.

Atas temuan dan rekomendasi BPK tersebut, progress tindak lanjut yang telah dilakukan oleh DJKN sampai dengan 31 Desember 2023 adalah:

Adapun progres sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut:

1) Berdasarkan Berita Acara Pemetaan antara Dit KND dan PT Pertamina EP tahun 2016 s.d. 2020, telah selesai dilaksanakan pemetaan terhadap selisih aset yang memerlukan klarifikasi sebanyak 13.218 unit dengan nilai Rp1,79 triliun dan diperoleh penambahan nilai aset yang menjadi objek sewa sebesar Rp612.413.874.473,00.

2) Berdasarkan hal tersebut telah disampaikan surat kepada Pertamina EP Nomor S-514/KN.5/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Konfirmasi Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina dan Nomor S-2329/KN.5/2021 tanggal 18 November 2021 perihal Penyesuaian Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina Oleh PT Pertamina EP yang intinya menyampaikan kekurangan sewa yang harus dibayar oleh PT Pertamina setelah adanya pemetaan.

3) PT Pertamina menyampaikan tanggapan melalui surat Nomor 0169/PEP00000/2021-S0 tanggal 20 April 2021 sebagai berikut:

4) Pada saat melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Kegiatan Operasional Perusahaan Dalam Rangka Pengelolaan Hulu Migas Tahun 2017 s.d Semester I 2019 pada Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaan terkait, BPK RI mengeluarkan rekomendasi agar hasil

Phisical Check BMN Pertamina diteruskan kepada pihak terkait yaitu PT Pertamina (Persero) dan DJKN Kemenkeu. BPK menyampaikan bahwa Pertamina EP berpotensi menanggung biaya pembayaran sewa yang lebih besar dari yang seharusnya karena tidak segera mengajukan pemutahiran daftar BMN aset Eks Pertamina sebagai dasar peninjauan kembali perhitungan biaya sewa BMN.

5) Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi BPK dimaksud, PT Pertamina EP menyampaikan Hasil Phisical Check Aset (PCA) 2019 sebagai berikut:

Kelas Aset Objek Sewa	Digunakan	Tidak Digunakan	Total
Bangunan	502.296.425.065	98.814.481.867	601.110.906.932
Equipment	4.157.250.251.287	1.731.901.048.119	5.889.151.299.406
Lain-lain	94.463.625.000	46.203.522.000	140.667.147.000
Subtotal Objek Sewa	4.754.010.301.352	1.876.919.051.986	6.630.929.353.338

6) Berdasarkan hasil PCA 2019 tersebut, aset yang digunakan oleh PT Pertamina EP tidak lagi sebesar Rp6.630.929.353.338, melainkan sebesar Rp4.754.010.301.352.

7) Menindaklanjuti hal tersebut, telah dilakukan pembahasan bersama dengan PT Pertamina EP sebanyak dua kali dan disepakati untuk dilakukan pembahasan lanjutan dengan melibatkan pihak lain yang terkait.

8) Terkait dengan koreksi besaran Piutang Sewa BMN eks Pertamina dari semula Rp1.176.715.352.919,00 menjadi Rp349.267.287.782,00 pada laporan keuangan, telah dimintakan permintaan pendapat melalui nota dinas Direktur PKNSI Nomor 2755/KN.5/2021 tanggal 17 November 2021 kepada Inspektorat IV dan Nomor 2756/KN.5/2021 tanggal 17 November 2021 kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yang pada intinya meminta pendapat apakah surat kepada Pertamina EP perihal Penyesuaian Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina dapat dijadikan dasar untuk dilakukan koreksi piutang.

9) Menanggapi permintaan pendapat tersebut, Inspektorat IV berpendapat agar Dit. PKNSI segera melakukan pembahasan dengan PT. Pertamina EP untuk menyepakati hasil proses identifikasi dan verifikasi atas BMN yang dimanfaatkan dan menyusun perjanjian pemanfaatan BMN berdasarkan hasil kesepakatan dengan PT. Pertamina EP. Mengingat Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 16 Akuntansi Piutang Berbasis Akrual mengatur pencatatan piutang pemanfaatan BMN pada neraca berdasarkan naskah perjanjian sewa.

10) Sehubungan dengan adanya perbedaan Penghitungan Besaran Dasar Sewa Aset Eks Pertamina telah dilakukan rapat via Zoom antara DJKN dengan Pihak PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP pada tanggal 24 April 2022, dimana berkaitan dengan adanya perbedaan besaran tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk kembali kepada angka dasar sewa sesuai kesepakatan semula yaitu sebesar Rp6.630.929.353.338,00 dan akan dilakukan koordinasi di internal kedua belah pihak.

11) Telah dilakukan pembahasan draft perjanjian sewa BMN Eks Pertamina pada 9 September 2022 sesuai undangan dari Direktur Regional 2 PT Pertamina EP melalui surat undangan nomor

1058/PEP00000/2022-S0 tanggal 07 September 2022. Selanjutnya, pada tanggal 30 September 2022 telah dilakukan pembahasan lanjutan draft perjanjian sewa bersama PT Pertamina EP dan masih akan diagendakan pembahasan lanjutan untuk finalisasi draft perjanjian tersebut. Sehubungan dengan jangka waktu sewa, telah dimintakan pendapat kepada Direktorat PKKN melalui nota dinas Direktur PKN Nomor ND-1505/KN.4/2022 tanggal 20 September 2022 hal Permintaan Pendapat terkait Perjanjian Sewa Barang Milik Negara Eks Aset Pertamina.

12) Telah dilakukan penandatanganan perjanjian sewa antara Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Direktur Utama PT Pertamina EP Nomor PRJ-1/MK.6/2022 Nomor 001/PEP00000/2022-S0 tanggal 27 Desember 2022. Dengan adanya kesepakatan perjanjian sewa tersebut dimana menggunakan angka dasar sewa sebesar Rp6.630.929.353.338,00 dengan jangka waktu perjanjian sewa selama 32 (tiga puluh dua) tahun terhitung sejak tanggal 17 September 2003 dan berakhir tanggal 16 September 2035, maka piutang yang timbul karena adanya selisih pengenaan angka dasar sewa dilakukan koreksi dari semula Rp1.176.715.352.919,00 menjadi Rp0,00.

Atas rekomendasi ini telah diusulkan selesai pada pembahasan tidak lanjut dengan BPK di awal tahun 2023.

d. Tindak Lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2020

Sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2020, terdapat temuan terkait BMN eks Pertamina, yaitu "Pengelolaan Aset Eks Pertamina Belum Memadai serta Belum Selesainya Perbedaan Penghitungan Besaran Dasar Sewa Aset Eks Pertamina antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan PT Pertamina EP" dengan rekomendasi BPK kepada Menteri Keuangan, sebagai berikut:

1) menyelesaikan inventarisasi dan penilaian atas 8.057 Aset Eks Pertamina dan menyajikan dalam Laporan Keuangan serta melakukan pengelolaan lebih lanjut terhadap minimal 45 unit aset yang tidak ditemukan dan 4.285 unit aset dalam kondisi rusak total dan atau FUPP sesuai ketentuan.

2) memerintahkan Dit. PKNSI melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Dit. PNKNL atas penyelesaian, pengukuran dan pencatatan 18 bidang tanah Aset Eks Pertamina; dan

3) melakukan verifikasi dan penilaian bersama dengan PT Pertamina EP untuk menetapkan nilai Aset Eks Pertamina dalam perjanjian pemanfaatan Aset Eks Pertamina dengan PT Pertamina EP dan menyelesaikan perbedaan nilai piutang serta menyesuaikan dampak pengakuan piutang terhadap nilai Investasi Permanen Pemerintah pada PT Pertamina yang disajikan dalam Laporan Keuangan.

Adapun progress tindak lanjut temuan dan rekomendasi BPK tersebut sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1) Dalam rangka penyelesaian IP BMN Eks Pertamina, Kementerian Keuangan telah melakukan IP atas 35.499 unit aset atau sekitar 83% dari total aset 42.989 unit, dan terhadap sisa aset 7.490 unit (17%) akan dilakukan rencana aksi melaksanakan IP dengan PT Pertamina EP secara bertahap, dengan memprioritaskan objek yang teknis, pelaksanaan IP yang lebih mudah serta

mempertimbangkan anggaran yang tersedia dan memperhatikan Pembatasan Sosial terkait Pandemi.

Sehubungan ditetapkannya PMK 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, terdapat perubahan tugas unit baru di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, termasuk juga antara lain peralihan tugas kegiatan Penatausahaan BMN pada Pengelola Barang yang dahulu pada Direktorat PKNSI menjadi tugas Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara. Menindaklanjuti hal tersebut telah dilakukan peralihan Tugas Penatausahaan serta pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian BMN eks Pertamina kepada Direktroat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara sesuai nota dinas Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Nomor ND-471/KN.4/2022 tanggal 13 Mei 2022.

2) Dalam rangka tindak lanjut temuan pengelolaan lebih lanjut terhadap minimal 45 unit aset yang tidak ditemukan dan 4.285 unit aset dalam kondisi rusak total dan atau FUPP, Dir. PKNSI dengan surat Nomor : S-1143/KN.5/2021 tanggal 20 Mei 2021 hal tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara eks Pertamina, meminta Pertamina untuk segera mengajukan FUPP terhadap 4.330 unit aset sebagai tindak lanjut IP 2012 s.d 2020 (terdiri dari 45 unit aset yang tidak ditemukan dan 4.285 unit aset dalam kondisi rusak total.

3) Dalam rangka tindak lanjut temuan perbedaan pencatatan 18 bidang tanah Aset Eks Pertamina, telah dilakukan rekonsiliasi dengan pihak PT Pertamina EP, Kementerian ESDM dan SKK Migas terkait 18 aset tersebut, berdasarkan rekonsiliasi tersebut disepakati bahwa 17 aset merupakan aset eks Pertamina sedangkan 1 aset sisanya akan dilakukan penelitian dokumen terlebih dahulu oleh PT Pertamina EP.

4) Terkait dengan sisa 1 aset tersebut, Direktorat PKN telah menyampaikan permintaan konfirmasi kepada pihak PT. Pertamina EP melalui Surat Direktur PKN Nomor S-225/KN.4/2022 tanggal 10 Juli 2022. PT. Pertamina EP telah menjawab surat tersebut melalui surat Nomor 1009/PEP01100/2022-S0 tangaal 15 Agustus 2022 perihal Konfirmasi status Aset Tanah Eks Pertamina yang menyatakan bahwa 1 aset berupa tanah yang tercatat dengan deskripsi "aset tanah pipeline limanggis" pada Aset eks Pertamina dan tercatat dengan deskripsi aset "Cimanggis" pada CALK UAKPA BUN TK KKKS patut diduga merupakan objek yang berbeda.

5) Telah dilakukan rapat koordinasi sesuai surat undangan Direktur PKKN Nomor UND-257/KN.2/2023 tanggal 15 September 2023 yang dihadiri perwakilan Direktorat PKN, SKK Migas, PPBMN ESDM, PT Pertamina EP dimana dari hasi rapat tersebut Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara selaku UAKPA BUN TK Aset Eks PT Pertamina, SKK Migas selaku UAKPA BUN TK BMN Hulu Migas, dan PT Pertamina EP untuk melakukan identifikasi terhadap masing-masing aset yang tercatat pada setiap unit dengan melakukan desk review dan pemeriksaan fisik serta penelusuran lebih lanjut.

Progress penyelesaian perbedaan Penghitungan Besaran Dasar Sewa Aset Eks Pertamina antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan PT Pertamina EP sampai dengan Tahun 2022 lalu adalah sebagai berikut:

1) Terhadap selisih aset dengan nilai sebesar Rp2.841.878.588.184,00, sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2015, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah melakukan tindak

lanjut dengan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi aset lanjutan berupa penelitian lapangan antara DJKN, PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP sebagaimana Berita Acara Rekonsiliasi BA- 01/KN.3/REKON.PEP/2015 antara DJKN dengan Pertamina EP dengan hasil Jumlah aset bangunan, equipment, dan aset lainnya sebesar Rp8,425 Triliun, digunakan sebanyak Rp6,63 Triliun, dan aset yang tidak digunakan sebesar Rp1,794 Triliun.

2) Berdasarkan hasil Rekonsiliasi tahun 2015 di atas, dilakukan pemetaan atas aset Rp 1,794 Triliun dalam rangka verifikasi atas aset yang benar-benar tidak digunakan

3) Berdasarkan Berita Acara Pemetaan antara Dit KND dan PT Pertamina EP tahun 2016 s.d. 2020, telah selesai dilaksanakan pemetaan terhadap selisih aset yang memerlukan klarifikasi sebanyak 13.218 unit dengan nilai Rp1,79 triliun dan diperoleh penambahan nilai aset yang menjadi objek sewa sebesar Rp612.413.874.473,00.

4) Berdasarkan hal tersebut telah disampaikan surat kepada Pertamina EP Nomor S-514/KN.5/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Konfirmasi Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina dan Nomor S-2329/KN.5/2021 tanggal 18 November 2021 perihal Penyesuaian Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina Oleh PT Pertamina EP yang intinya menyampaikan kekurangan sewa yang harus dibayar oleh PT Pertamina setelah adanya pemetaan.

5) PT Pertamina menyampaikan tanggapan melalui surat Nomor 0169/PEP00000/2021-S0 tanggal 20 April 2021 sebagai berikut:

   a. Pada saat melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Kegiatan Operasional Perusahaan Dalam Rangka Pengelolaan Hulu Migas Tahun 2017 s.d Semester I 2019 pada Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaan terkait, BPK RI mengeluarkan rekomendasi agar hasil Phisical Check BMN Pertamina diteruskan kepada pihak terkait yaitu PT Pertamina (Persero) dan DJKN Kemenkeu. BPK menyampaikan bahwa Pertamina EP berpotensi menanggung biaya pembayaran sewa yang lebih besar dari yang seharusnya karena tidak segera mengajukan pemutahiran daftar BMN aset Eks Pertamina sebagai dasar peninjauan kembali perhitungan biaya sewa BMN.

   b. Berdasarkan hasil PCA 2019, aset yang digunakan oleh PT Pertamina EP tidak lagi sebesar Rp6.630.929.353.338, melainkan sebesar Rp4.754.010.301.352.

   c. Sehubungan dengan adanya perbedaan Penghitungan Besaran Dasar Sewa Aset Eks Pertamina telah dilakukan rapat via Zoom antara DJKN dengan Pihak PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP pada tanggal 24 April 2022, dimana berkaitan dengan adanya perbedaan besaran tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk kembali kepada angka dasar sewa sesuai kesepakatan semula yaitu sebesar Rp6.630.929.353.338, dan akan dilakukan koordinasi di internal kedua belah pihak.

   d. Telah dilakukan pembahasan draft perjanjian sewa BMN Eks Pertamina pada 9 September 2022 sesuai undangan dari Direktur Regional 2 PT Pertamina EP melalui surat undangan nomor 1058/PEP00000/2022-S0 tanggal 07 September 2022. Selanjutnya, pada tanggal 30 September 2022 telah dilakukan pembahasan lanjutan draft perjanjian sewa bersama PT Pertamina EP dan masih akan diagendakan pembahasan lanjutan untuk finalisasi draft perjanjian tersebut. Sehubungan dengan jangka waktu sewa, telah dimintakan pendapat

kepada Direktorat PKKN melalui nota dinas Direktur PKN Nomor ND-1505/KN.4/2022 tanggal 20 September 2022 hal Permintaan Pendapat terkait Perjanjian Sewa Barang Milik Negara Eks Aset Pertamina.

e. Telah dilakukan penandatanganan perjanjian sewa antara Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Direktur Utama PT Pertamina EP Nomor PRJ-1/MK.6/2022 Nomor 001/PEP00000/2022-S0 tanggal 27 Desember 2022. Dengan adanya kesepakatan perjanjian sewa tersebut dimana menggunakan angka dasar sewa sebesar Rp6.630.929.353.338,00 dengan jangka waktu perjanjian sewa selama 32 (tiga puluh dua) tahun terhitung sejak tanggal 17 September 2003 dan berakhir tanggal 16 September 2035, maka piutang yang timbul karena adanya selisih pengenaan angka dasar sewa dilakukan koreksi pada tahun 2022 lalu dari semula Rp1.176.715.352.919,00 menjadi Rp0,00.

Pada pembahasan tindak lanjut di awal 2023, seluruh rekomendasi ini telah diusulkan selesai, namun sampai dengan akhir tahun 2023 belum terdapat keputusan dari BPK terkait dengan usulan penyelesaian rekomendasi sebagaimana dimaksud.

e. Tindak Lanjut Pengamanan Bukti Kepemilikan Tanah

Terkait dengan pengamanan bukti kepemilikan tanah yang disajikan dalam laporan keuangan, mengingat dokumen kepemilikan sampai dengan saat ini disimpan oleh PT Pertamina EP, Direktorat PKN telah meminta dokumen/bukti kepemilikan melalui:

1) Surat Dirjen Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Pertamina EP nomor S-628/MK.6/2021 tanggal 31 Desember 2021 hal Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Aset Eks Pertamina Berupa Tanah dan telah ditindaklanjuti dengan rapat pembahasan dengan PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP pada tanggal 1 April 2022.

2) Surat Direktur PKN DJKN yang ditujukan kepada SVP Asset Management PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Pertamina EP nomor S-371/KN.4/2022 tanggal 23 Agustus 2022 hal Permintaan Progress Penelusuran Dokumen Kepemilikan Aset Eks Pertamina Berupa Tanah.

3) Surat Dirjen Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) nomor S-52/MK.6/2023 tanggal 25 Januari 2023 yang ditujukan kepada PT Pertamina (Persero) hal Permintaan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Aset Eks Pertamina Berupa Tanah.

Adapun pada tahun 2024 akan kembali disampaikan surat permintaan dokumen kepemilikan dan rapat koordinasi dengan PT Pertamina EP

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS PENGELOLAAN ASET EKS PERTAMINA OLEH LMAN

Pada periode pelaporan 2016, Aset eks Pertamina yang diserahkelolakan kepada LMAN masih dicatat oleh UAKPA BUN BA 999.99 pada Direktorat KND. Dengan adanya kebijakan Direktur APK sesuai surat Nomor S-11561/PB.6/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Pengelolaan Aset BUN oleh LMAN, maka pencatatan atas aset BUN kelolaan LMAN berikut segala hak dan kewajiban yang melekat pada aset tersebut tidak lagi dicatat dan disajikan pada Laporan Keuangan BUN BA 999.99 Transaksi Khusus periode

pelaporan 2017. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan koreksi pada Laporan Keuangan 2017 atas pos-pos yang terkait pengelolaan Aset eks Pertamina kelolaan LMAN yang telah diserahkelolakan sebelum periode pelaporan. Selanjutnya, atas transaksi penyerahkelolaan aset kepada LMAN yang terjadi pada periode berjalan, diperlakukan sebagai Transfer Keluar.

4. PERALIHAN PENGELOLAAN ASET EKS PERTAMINA KEPADA DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA

Surat Perintah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PRIN-25.1/KN/2020 tanggal 17 Januari 2020, memberikan penugasan pengelolaan BMN eks Pertamina yang sebelumnya dikelola oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, dialihkan kepada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya PMK 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, terjadi perubahan nomenklatur dari semula Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi menjadi Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara.

Berdasarkan surat perintah tersebut, kewenangan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara untuk menandatangani persetujuan/keputusan yang terkait dengan pengelolaan BMN eks Pertamina sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235 Tahun 2023. Dan tanggung jawab sebagai UAKPA BUN TK pengelola Aset Eks Pertamina sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara.

C. BMN Idle

1. Terdapat aset yang telah ditetapkan sebagai BMN idle namun belum dilakukan serah terima kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut:

   a) Dua Bidang Tanah Bangunan Pos Jaga dan empat unit Gedung Pos Jaga Permanen yang terletak di Kabupaten Sumenep, Sampang, dan Bangkalan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 44/KM.6/WKN.10/KNL.05/2021 tanggal 26 Oktober 2021 karena belum terdapat Berita Acara Serah Terima Antara Kementerian Keuangan c.q. KPPBC Pratama Madura dengan Kementerian Keuangan c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pamekasan.

   b) Satu unit Bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan satu unit Bangunan Gedung Kantor Permanen yang terletak di Jl. Pahlawan, Desa Ngawen, Kec. Sidayu, Kab. Gresik, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 198/KM.6/WKN.10/KNL.01/2017 karena belum terdapat Berita Acara Serah Terima antara Kementerian Keuangan c.q. KPP Pratama Gresik Utara dengan Kementerian Keuangan c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya.

2. Terdapat aset yang telah ditetapkan status penggunaannya kepada Pengguna Barang namun belum dilakukan serah terima antara Pengelola Barang dengan Pengguna Barang dengan rincian sebagai berikut:

   a) Satu unit Bangunan Gedung kantor Permanen yang terletak di Jl. Pelajar Pejuang 45 No 8, Kel. Lingkar Selatan, Kec. Lengkong, Kota Bandung ditetapkan status penggunaan pada Kementerian Perhubungan RI.

b) Satu unit Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya yang terletak di Komplek Taman Mutiara Blok C-IV/18 Bandung Barat ditetapkan status penggunaan pada Kementerian Perhubungan RI.

c) Satu bidang Tanah Persil Lainnya dan satu unit Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya yang terletak di Jl. Jabir no.3 RT 05/07 Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu ditetapkan status penggunan pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

d) Satu bidang Tanah Persil Lainnya dan satu unit Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya yang terletak di Jl. Mawar luar RT 03 RW 06 Kel. Tugu Utara Kec. Koja ditetapkan status penggunan pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

D. Aset BLBI

1. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA TERKAIT ASET LANCAR

a. Aset Kredit eks BPPN

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.06/2009, Aset Kredit adalah aset yang berupa tagihan bank terhadap para debiturnya yang menurut ketentuan perbankan telah masuk dalam kolektibilitas 5 (lima)/macet, kemudian oleh bank dialihkan kepada BPPN dalam bentuk tagihan atas piutang bank.

Aset kredit eks BPPN diklasifikasikan menjadi aset kredit Asset Transfer Kit (ATK), aset kredit Non Asset Transfer Kit (Non ATK), dan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).Aset kredit ATK adalah aset kredit yang tercatat dalam Bunisys atau Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB).Sedangkan, Aset kredit Non ATK adalah aset kredit yang tidak tercatat dalam Bunisys atau SAPB.SAPB adalah sistem yang memuat informasi status dan kewajiban aset kredit.
Untuk mengetahui nilai aset kredit eks BPPN yang dikelola Kementerian Keuangan c.q. DJKN, pada tahun 2009 dan 2011 telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap berkas kasus aset kredit eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Apabila dari hasil inventarisasi dan verifikasi tersebut diketahui debitur telah memenuhi syarat ada dan besarnya piutang negara maka hal tersebut ditindaklanjuti dengan penyerahan pengurusan piutang negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara.

Sesuai ketentuan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transaksi Khusus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018, aset kredit ATK diakui sebagai piutang lain-lain sebesar nilai yang tercatat dalam SAPB, sedangkan aset kredit Non ATK dan PKPS diakui sebagai piutang lain-lain setelah ditandatanganinya Pernyataan Bersama (PB)/diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Untuk aset kredit Non ATK dan PKPS yang belum ditandatangani PB/diterbitkan PJPN disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Aset kredit ATK disajikan di Neraca sebesar nilai yang tercatat pada SAPB sedangkan aset kredit Non ATK yang telah ditandatangani PB/PJPN disajikan di Neraca sebesar nilai dalam dokumen PB/PJPN.Adapun untuk aset kredit Non ATK yang belum ditandatangani PB/diterbitkan PJPN disajikan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Nilai Per 31 Desember 2023
1	Aset Kredit Non ATK Yang Belum diterbitkan PB/PJPN	780.664.829.748
2	Aset Kredit Non ATK Yang Masih Dikelola DJKN	31.142.123.653.733
3	Tagihan PKPS Yang Belum Diterbitkan PB/PJPN	0
4	Hasil Inventarisasi Aset Kredit Non ATK	240.900.000
	Jumlah	**31.923.029.383.480**

Sedangkan untuk tagihan PKPS yang belum diterbitkan PB/PJPN oleh PUPN c.q. KPKNL yaitu:

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2022
-	-	0
	Jumlah	**0**

Pada Tahun 2023 telah dilakukan penyerahan aset kredit eks BPPN baik ATK maupun Non ATK senilai Rp10.980.072.298.798,00 dengan rincian sebagai berikut:

Mata Uang	Nilai	Jumlah Aset Kredit	Nilai Dalam Rupiah
Dollar Amerika (USD)	352.217.930	48	5.429.791.609.188
Rupiah (IDR)	5.532.256.483.345	721	5.532.256.483.345
Dollar Singapura (SGD)	1539000	1	18.024.206.265
Grand Total	**1.527.971.806.739**	**770**	**10.980.072.298.798**

Direktorat PKN melakukan penatausahaan barang jaminan atas aset kredit eks BPPN (selain PKPS) dan eks kelolaan PT PPA (Persero) yang telah diserahkan kepada PUPN sampai dengan periode Tahun 2023 sebagai berikut:

No.	Jenis Kepemilikan	Jumlah Aset Kredit
1	AJB	1276
2	BORTOGCH	1322
3	BPK	55
4	BPKB	4200
5	FAKTUR	95
6	GIRIK	254
7	IJAZAH	72
8	KET-KEPALA-DESA	46
9	KWITANSI	59
10	LAIN-LAIN	4908
11	SHGB	2578
12	SHGU	41
13	SHM	5234
14	SHP	85
15	SIPTB	52
16	TASPEN	45
17	(Blank)	88
Grand Total		**20.410**

Direktorat PKN akan menyempurnakan data penatausahaan barang jaminan dimaksud yang masih dikelola dan belum diadministrasikan oleh DJKN serta masih dalam proses inventarisasi DJKN.

b. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) diatur formula penyisihan sebagai berikut:

1) Penyisihan piutang tidak tertagih dari piutang eks BPPN selain tagihan PKPS dan piutang eks kelolaan PT PPA (Persero) dihitung dengan cara saldo akhir piutang dikurangi hasil perkalian dari saldo akhir piutang dikalikan tingkat pengembalian (recovery rate) piutang eks BPPN selain tagihan PKPS dan piutang eks kelolaan PT PPA;

2) Penyisihan piutang tidak tertagih yang berasal dari tagihan PKPS ditetapkan sebesar 100% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan. Ketentuan mengenai penilaian agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan Piutang tidak tertagih, dilaksanakan secara penuh paling lambat untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2016.

Hingga saat laporan keuangan ini disusun, penilaian agunan PKPS sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan piutang tak tertagih belum dilakukan secara menyeluruh, pada tahun 2015 penilaian baru dilakukan terhadap sebagian barang jaminan PKPS Obligor atas nama Kaharudin Ongko, Samadikun Hartono dan Trijono Gondokusumo. Sampai tahun 2020 belum dilakukan penilaian pada barang jaminan PKPS yang belum dinilai sebelumnya.

Penyisihan piutang tidak tertagih atas Piutang pada BDL ditetapkan sebesar 100% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Piutang pada PT PPA (Persero) adalah tagihan Kementerian Keuangan (bukan tagihan BBO/BBKU/BPPN) kepada PT PPA (Persero) terkait pelaksanaan perjanjian pengelolaan aset eks BPPN, dengan demikian, maka tagihan tersebut termasuk dalam piutang Pemerintah yang bersifat lancar sehingga penyisihan atas piutang tersebut merupakan ruang lingkup dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014. Besaran penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang lancar ditetapkan sebesar 5 0/00(lima permil) dari piutang.

c. ASET PROPERTI EKS BANK DALAM LIKUIDASI

1) Penerimaan Pembiayaan Non Tunai dari Penetapan Status Penggunaan Aset Properti

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi Oleh Menteri Keuangan, telah diatur salah satu pengelolaan aset properti adalah penetapan aset properti menjadi Barang Milik Negara. Aset Properti yang ditetapkan menjadi Barang Milik Negara terlebih dahulu dilakukan penilaian untuk memperoleh nilai wajar aset properti.

Dalam Pasal 68 telah diatur bahwa hasil pengelolaan aset berupa uang tunai atau non tunai diperhitungkan sebagai pengurang piutang Pemerintah Republik Indonesia pada Bank Dalam Likuidasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Hasil pengelolaan aset non tunai yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang piutang Pemerintah Republik Indonesia pada Aset Properti Eks Bank Dalam Likuidasi terdiri dari:

Ketetapan	Aset Properti Esk BDL	Bank	Nilai	Ket
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/KM.6/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Penetapan Aset Properti Eks Bank Dalam Likuidasi Sebagai Barang Milik Negara Pada Pengelola Barang	7 (tujuh) bidang tanah yang berada di Jalan H. Jaya I RT 02/RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	PT Bank Global Internasional, Tbk (DL)	Rp45.694.058.000,00	Belum bisa diakui karena belum serah terima
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/KM.6/2022 tanggal 27 September 2022 tentang Penetapan Aset Properti Eks Bank Dalam Likuidasi Sebagai Barang Milik Negara Pada Badan Narkotika Nasional	tanah dan bangunan di Jl. Raya Baros No.33 RT.04/RW.01, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi	PT. Sejahtera Bank Umum (DL)	Rp35.143.950.000,00	Diakui karena sudah serah terima
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/KM.6/2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Penetapan Starus Pengunaan Aset Properti Eks Bank Dalam Likuidasi sebagai Barang Milik Negara pada Kepolisian Negara Repulik Indonesia	tanah kosong di Jl. Gajah Mada Nomor 95, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu Provinsi Jawa Timur dan tanah dan bangunan di Jl. Panglima Sudirman Nomor 106, Desa Pesanggrahan, Kecamantan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur	PT. Sejahtera Bank Umum (DL)	Rp10.342.668.000,00	Diakui karena sudah serah terima
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/KM.6/2023 tanggal 2023 tentang Penetapan Starus Pengunaan Aset Properti Eks Bank Dalam Likuidasi sebagai Barang Milik	Tanah dan/atau bangunan di Jl. Cokroaminoto Nomor 58/Jalan Sutomo, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kota Tanjungbalai	PT. Sejahtera Bank Umum (DL)	Rp2.371.999.000,00	Diakui karena sudah serah terima

Ketetapan	Aset Properti Esk BDL	Bank	Nilai	Ket
Negara pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional				
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/KM.6/2023 tanggal 30 Juli 2023 tentang Penetapan Aset Properti Eks Bank Dalam Likuidasi Sebagai Barang Milik Negara Pada Kementerian Hukum dan Ham	Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, terletak di Gudang MABAR, Komp Mabar Estate, Jl Tojai, Kel. Mabar, Kec.Medan Denai, Kota Medan	PT. Sejahtera Bank Umum (DL)	20.489.800.000,00	Diakui karena sudah serah terima
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/KM.6/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Penetapan Aset Properti Eks Bank Dalam Likuidasi Sebagai Barang Milik Negara Pada Kementerian Keuangan	Perumahan Taman Pelita Permai Jl. Sei Silau Blok A No.5A, Kel. Kisaran Kota Kec. Kota Kisaran Barat, Sumatera Utara	PT. Sejahtera Bank Umum (DL)	405.524.000,00	Diakui karena sudah serah terima

2) Penerimaan dari Pemanfaatan Aset Properti Dalam Bentuk Sewa

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi Oleh Menteri Keuangan, telah diatur salah satu pengelolaan aset properti adalah pemanfaatan aset properti dengan cara sewa. Dalam Pasal 65 telah diatur bahwa hasil pengelolaan aset berupa uang tunai berasal dari sewa aset properti, dikenakan biaya pengelolaan aset pada MAP 425149 (Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya dari Pengelola Barang) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Satuan Kerja Kantor Pusat DJKN, Kementerian Keuangan (Bagian Anggaran 015).

Pada periode Tahun 2023 pembayaran sewa adalah sebagai berikut:

Ketetapan	Aset Properti Esk BDL	Bank	Nilai	Ket
Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-109/KN/2023 tentang Sewa Aset Properti Eks Bank Dalam Likuidasi dengan Sdr. Heri Irawan	Tanah dan bangunan sesuai SHM Nomor 226/Kisaran Barat seluas 128 m² dan SHM Nomor 227/KisaranBarat seluas 129 m²	PT. Sejahtera Bank Umum (DL)	Rp20.506.000,00	-

d. ASET KREDIT EKS BANK DALAM LIKUIDASI

Penerimaan dari Pengelolaan Aset Kredit yang Telah Diserahkan kepada PUPN

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi Oleh Menteri Keuangan, telah diatur salah satu pengelolaan aset kredit meliputi penatausahaan dan penyerahan pengurusan kepada Panitia Urusan Piutang

Negara (PUPN). Pelaporan pengelolaan aset kredit yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN, dilakukan rekonsiliasi aset kredit paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester antara Direktorat PKNSI selaku Penyerah Piutang dengan PUPN (dhi. KPKNL).
Berdasarkan data yang berasal dari Modul MPN G3 NOW selama Tahun 2022, telah tercatat setoran per MAP 711313. Direktorat PKN selaku unit pengelola aset eks BDL telah melakukan analisa dan pengakuan terhadap penerimaan pada MAP 711313 tersebut dan berdasarkan hasil rekonsiliasi Tahunan dengan KPKNL selaku Anggota PUPN Cabang.
Rincian hasil pengelolaan aset dari pembayaran/pelunasan aset kredit per KPKNL selama tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

No.	KPKNL (Anggota PUPN Cabang)	MAP 711313	MAP 817713
1	Banda Aceh	1.363.635,00	
2	Bandung	42.450.586,00	
3	Bekasi	268.971.385,00	
4	Denpasar	6.814.273.958,00	130.625.503,00
5	Jakarta IV	37.015.679.461,00	7.477.280,00
6	Jakarta V	7.880.849.761,00	
7	Lhoksumawe	553.784,00	
8	Madiun	179.654,00	6.710,00
9	Makasar	12.999.037.504,42	499.443.808,58
10	Manado	34.667.588,00	
11	Medan	50.000.003,00	
12	Padang	172.723.175,00	
13	Palembang	1.251.000,00	
14	Pontianak	402.727.271,00	
15	Semarang	185.606.000,00	
16	Serang	8.464.602,00	
17	Sidoarjo	15.440.908,00	389.915,00
18	Surabaya	278.911.970,00	7.517.701,00
19	Surakarta	30.622.175,00	
20	Tangerang II	318.217.809,00	
	JUMLAH	**66.521.992.229,42**	**645.460.917,58**

e. ASET SURAT BERHARGA EKS BANK DALAM LIKUIDASI

Penerimaan Pembiayaan dari Dividen Tunai Saham

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi Oleh Menteri Keuangan, telah diatur salah satu pengelolaan aset surat berharga adalah permintaan pembayaran atas dividen saham atau bunga obligasi. Direktorat PKNSI selaku pengelola barang atas aset eks Bank Dalam Likuidasi meminta pembayaran atas dividen saham dan/atau bunga obligasi setiap jatuh tempo. Pada periode Tahun 2023 pembayaran atas Deviden Tunai Saham adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai Pembayaran	Bank Asal	Tanggal Bayar
1	Dividen tunai saham PT Aplikanusa Lintasarta Tahun 2022 BDL	112.813.947	PINAESAAN	24/07/2023

No	Keterangan	Nilai Pembayaran	Bank Asal	Tanggal Bayar
2	Dividen tunai saham PT Aplikanusa Lintasarta Tahun 2022 BDL	56.406.896	INDUSTRI	24/07/2023
3	Dividen tunai saham PT Aplikanusa Lintasarta Tahun 2022 BDL	439.974.747	SEJAHTERA BANK UMUM	24/07/2023
4	Dividen tunai saham PT Aplikanusa Lintasarta Tahun 2022 BDL	56.406.896	BANK HARAPAN SANTOSA	24/07/2023

f. DANA FIHAK KETIGA

1) Penjelasan Umum Nasabah Penyimpan Dana

MAP Nomor 817713 (Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi) merupakan pos penerimaan hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah eks Bank Dalam Likuidasi UP3, yang selanjutnya akan disetorkan oleh Pemerintah ke rekening Nomor:

a) 0019955279 atas nama Otoritas Jasa Keuangan qq. Nasabah eks Bank Dalam Likuidasi pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk : untuk PT Bank Asiatic (Dalam Likuidasi);
b) 070-0004080201 atas nama Otoritas Jasa Keuangan qq. Nasabah eks Bank Dalam Likuidasi pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk : untuk PT Bank Global Internasional, Tbk (DL) dan PT Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi).

Penyetoran hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah eks Bank Dalam Likuidasi UP3 dimaksud dilaksanakan sesuai ketentuan penyetoran sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan Nomor MoU-07/MK.06/2015 – PRJ-39/D.01/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Percepatan Penyelesaian Kewajiban Bank Dalam Likuidasi eks Program Penjaminan kepada Pemerintah.

2) Proporsi Hasil Pengelolaan Aset setelah Diperhitungkan dengan Pembayaran kepada Nasabah Penyimpan Dana yang merupakan Hak Pemerintah
   a) PT Bank Global Internasional, Tbk (DL):
      - hak Pemerintah sebesar 96,3% ke Rekening Nomor 502.000.000.980, dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) Nomor 711313 (Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks Bank Dalam Likuidasi).
      - hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah sebesar 3,7% ke Rekening Nomor 502.000.000.980, dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) Nomor 817713 (Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi), dan ditambahkan berita ”hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah Eks PT Bank Global Internasional Tbk., (DL)”.

b) PT Bank Asiatic (DL)

- hak Pemerintah sebesar 99,93% ke Rekening Nomor 502.000.000.980, dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) Nomor 711313 (Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks Bank Dalam Likuidasi).
- hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah sebesar 0,07% ke Rekening Nomor 502.000.000.980, dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) Nomor 817713 (Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi), dan ditambahkan berita ”hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah Eks PT Bank Global Internasional Tbk., (DL)”.

c) PT Bank Dagang Bali (DL)

- hak Pemerintah sebesar 96,40% ke Rekening Nomor 502.000.000.980, dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) Nomor 711313 (Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks Bank Dalam Likuidasi).
- hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah sebesar 3,60% ke Rekening Nomor 502.000.000.980, dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) Nomor 817713 (Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi), dan ditambahkan berita ”hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah Eks PT Bank Dagang Bali (DL)”.

3) Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi

Rincian penerimaan Nasabah Penyimpan Dana atas hasil pengelolaan aset disajikan dalam tabel berikut:

a) Tahun 2017

BDL UP3	DPK MAP 817713
BANK ASIATIC	1.874.999
BANK GLOBAL INTERNASIONAL	16.650.000
BANK DAGANG BALI	0
JUMLAH	18.524.999

b) Tahun 2018

BDL UP3	DPK MAP 817713
BANK ASIATIC	480.235
BANK DAGANG BALI	149.327.009
BANK GLOBAL INTERNASIONAL	20.350.000
JUMLAH	170.157.244

c) Tahun 2019

BDL UP3	DPK MAP 817713
BANK ASIATIC	89.678
BANK DAGANG BALI	100.518.124
BANK GLOBAL INTERNASIONAL	28.318.966
BANK GLOBAL INTERNASIONAL (Non Tunai)	122.089.640
JUMLAH	251.016.408

d) Tahun 2020

BDL UP3	DPK MAP 817713
BANK ASIATIC	15.273
BANK DAGANG BALI	78.401.540
BANK GLOBAL INTERNASIONAL	35.150.000
JUMLAH	113.566.813

e) Tahun 2021

BDL UP3	DPK MAP 817713
BANK DAGANG BALI	85.325.255
BANK GLOBAL INTERNASIONAL	1.320.120.232
BANK GLOBAL INTERNASIONAL (Non Tunai)	61.420
JUMLAH	1.405.506.907

f) Tahun 2022

BDL UP3	DPK MAP 817713
BANK ASIATIC	78.812
BANK DAGANG BALI	82.439.750
BANK GLOBAL INTERNASIONAL	68.817.026
JUMLAH	151.335.580

g) Tahun 2023

BDL UP3	**DPK MAP 817713**
BANK ASIATIC	0,00
BANK DAGANG BALI	265.407.986,00
BANK GLOBAL INTERNASIONAL	499.443.808,00
JUMLAH	**764.851.794,00**

4) Pembayaran Nasabah Penimpan Dana

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi Oleh Menteri Keuangan, telah diatur mekanisme pembayaran Nasabah Penyimpan Dana (NPD). Pembayaran NPD dilakukan ke rekening pada bank yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan realisasi dana pembayaran NPD pada kas negara pada tahun berjalan.

Dalam Pasal 77 telah diatur bahwa Direktur Jenderal menetapkan keputusan mengenai besaran pembayaran NPD untuk masing-masing BDL berdasarkan realisasi dana pembayaran NPD pada kas negara tahun berjalan. Selanjutnya, berdasarkan data realisasi dana NPD dan keputusan Direktur Jenderal mengenai besaran pembayaran NPD, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini Direktur PKNSI selaku KPA Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus Pengelola Aset yang Timbul dari Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (UAKPA BUN TK BLBI) menerbitkan Surat Ketetapan Pembayaran (SKP).

a) Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Tahun 2017 s.d. 2019

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 195/KN/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Besaran Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Untuk PT Bank Asiatic (DL), PT Bank Dagang Bali (DL), dan PT Bank Global Internasional (DL) Berdasarkan Data Realisasi Dana Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Pada Kas Negara Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019, telah diterbitkan Surat Ketetapan Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Tahun 2020 Nomor SKP-001/KN.5/KPA/2020 sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) NPD Tahun 2020 sebesar Rp317.609.011.

Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00001A/978706/2020 tanggal Juli 2020 sebesar Rp2.444.912 untuk pembayaran NPD PT Bank Asiatic (DL) periode tahun 2020. Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00002A/978706/2020 tanggal Juli 2020 sebesar Rp249.845.133 untuk pembayaran NPD PT Bank Dagang Bali (DL) periode tahun 2020. Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00003A/978706/2021 tanggal Juli 2020 sebesar Rp65.318.966 untuk pembayaran NPD PT Bank Global Internasional (DL) periode tahun 2020.

b) Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Tahun 2020

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 153/KN/2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Besaran Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Untuk PT Bank Asiatic (DL), PT Bank Dagang Bali (DL), dan PT Bank Global Internasional (DL) Berdasarkan Data Realisasi Dana Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Pada Kas Negara Tahun 2020, telah diterbitkan Surat Ketetapan Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Tahun 2021 Nomor SKP-001/KN.5/KPA/2021 sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) NPD Tahun 2021 sebesar Rp113.566.813.

Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00001A/978706/2021 tanggal 1 April 2021 sebesar Rp15.273 untuk pembayaran NPD PT Bank Asiatic (DL) periode tahun 2020. Telah dilakukan pembayaran NPD

melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00002A/978706/2021 tanggal 1 April 2021 sebesar Rp78.401.540 untuk pembayaran NPD PT Bank Dagang Bali (DL) periode tahun 2020. Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00003A/978706/2021 tanggal 1 April 2021 sebesar Rp35.150.000 untuk pembayaran NPD PT Bank Global Internasional (DL) periode tahun 2020.

c) Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Tahun 2021

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 127/KN/2022 tanggal 24 Maret 2022 tentang Besaran Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Untuk PT Bank Asiatic (DL), PT Bank Dagang Bali (DL), dan PT Bank Global Internasional (DL) Berdasarkan Data Realisasi Dana Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Pada Kas Negara Tahun 2021, telah diterbitkan Surat Ketetapan Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Tahun 2021 Nomor SKP-001/KN.5/KPA/2022 sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) NPD Tahun 2021 sebesar Rp1.405.445.487.

Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00001A/978706/2022 tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp85.325.255 untuk pembayaran NPD PT Bank Dagang Bali (DL) periode tahun 2021. Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00002A/978706/2022 tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp1.320.120.232 untuk pembayaran NPD PT Bank Global Internasional (DL) periode tahun 2021.

d) Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Tahun 2022

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 158/KN/2023 tanggal 6 November 2023 tentang Besaran Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Untuk PT Bank Asiatic (DL), PT Bank Dagang Bali (DL), dan PT Bank Global Internasional (DL) Berdasarkan Data Realisasi Dana Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Pada Kas Negara Tahun 2022, telah diterbitkan Surat Ketetapan Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Tahun 2022 Nomor SKP-001/KN.5/KPA/2022 sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) NPD Tahun 2021 sebesar Rp1.405.445.487,00.

Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00001A/978706/2022 tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp85.325.255,00 untuk pembayaran NPD PT Bank Dagang Bali (DL) periode tahun 2021. Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00002A/978706/2022 tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp1.320.120.232,00 untuk pembayaran NPD PT Bank Global Internasional (DL) periode tahun 2021.

2. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA TERKAIT ASET LAINNYA

a. ASET PROPERTI EKS BPPN

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.06/2009, aset properti adalah barang tetap berupa tanah dan bangunan yang pada awalnya merupakan jaminan utang atas kredit di bank, karena debitur tidak mampu melakukan pembayaran utang dengan uang tunai maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan barang jaminan utang yang berupa fixed asset dengan media peralihan berupa Akta Pelepasan Hak yang dibuat dihadapan Notaris, Akta

Perjanjian Jual Beli yang dibuat oleh Notaris, Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT atau Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang atau dapat juga berbentuk akta-akta lainnya yang pada intinya menyerahkan barang jaminan sebagai kompensasi atas pembayaran utang.

Untuk mengetahui jumlah dan nilai aset properti eks BPPN yang dikelola Kementerian Keuangan c.q. DJKN, pada tahun 2009 dan 2011 telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap berkas/dokumen aset properti eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selanjutnya dilakukan penilaian atas aset properti hasil inventarisasi tersebut dan melaporkannya di neraca.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 mengungkapkan permasalahan antara lain Pemerintah belum menyajikan aset properti eks BPPN sejumlah 843 (delapan ratus empat puluh tiga) aset dengan nilai sebesar Rp1.070.152.309.824. Terhadap permasalahan ini, Direktorat PKNSI telah melakukan penelusuran terhadap selisih data tersebut dan menyampaikan hasil penelusuran kepada Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 9 September 2013. Setelah dilakukan verifikasi oleh BPK, maka sisa aset properti eks BPPN yang masih harus ditelusuri per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Uraian	Unit	Nilai (Rp)
Aset Properti Eks BPPN yang perlu ditelusuri	843	1.070.152.309.824,00
Hasil Penelusuran TA 2013:		
Terjual di BPPN dan PPA	7	36.496.849.932,00
Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA	16	13.376.203.837,00
Sita Kejaksaan dan Indikasi Sita	145	482.990.603.126,92
Aset jaminan BDL dan PKPS	26	35.552.445.176,15
Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	23	101.446.523.368,23
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2013)	**626**	**400.289.684.383,89**

Untuk menindaklanjuti sisa selisih penelusuran data aset properti eks BPPN dalam LHP BPK per 31 Desember 2013, pada tahun 2014, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PKNSI telah melakukan upaya sebagai berikut:

1) Menyampaikan surat kepada PT PPA (Persero) dengan nomor S-1509/KN.5/2014 tanggal 31 Desember 2014 terkait aset properti yang terjual selama periode pengelolaan oleh PT PPA (Persero).

2) Menyampaikan surat kepada Notaris/PPAT dengan nomor S-1501 s.d. S-1504/KN.5/2014 tanggal 31 Desember 2014 terkait penjualan aset properti yang dilakukan oleh BPPN.

3) Menyampaikan surat kepada Kantor Pertanahan Setempat dengan surat nomor S-1799 s.d. S-1927/KN.5/2014 tanggal 25 Juli 2014 terkait permintaan klarifikasi dan konfirmasi kepada pemegang hak atas tanah.

4) Menyampaikan surat kepada KPKNL dengan nomor S-2063/KN.5/2014 tanggal 28 Agustus 2014 guna meminta bantuan untuk melakukan peninjauan fisik atas aset-aset properti.

Data dan dokumen yang diperoleh dari upaya-upaya tersebut di atas, telah disampaikan oleh Kementerian Keuangan c.q. DJKN kepada BPK RI melalui surat Nomor S-1503/KN/2014 tanggal 3 Oktober 2014. Dari hasil verifikasi BPK terhadap data dan dokumen-dokumen tersebut diperoleh keyakinan sebagai berikut:

Uraian	Unit	Nilai (Rp)
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2013)	626	400.289.684.383,89
Hasil Penelusuran TA 2014:		
Terjual di BPPN dan PPA	122	50.135.490.148
Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA	8	59.069.114.858
Aset Sewa yang digunakan Bank (tercatat dengan keterangan sewa)	20	5.090.723.763
Aset jaminan BDL dan PKPS	84	94.040.671.431
Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	35	69.934.452.664
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2014)	**357**	**122.019.231.519**

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKBUN tahun 2014 disebutkan bahwa sisa aset properti yang masih harus ditelusuri sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebanyak 358 unit senilai Rp122.019.231.521. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan selama bulan Januari s.d. Desember 2015 telah berhasil ditemukan dokumen pendukung atas 156 unit aset senilai Rp59.022.012.099.

Uraian	Unit	Nilai (Rp)
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2015)	358	122.069.231.521
Hasil Penelusuran TA 2015:		
Terjual di BPPN dan PPA	20	6.266.711.167
Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA	1	-
Sita Kejaksaan dan Indikasi Sita	1	133.203.182
Aset Sewa yang digunakan Bank (tercatat dengan keterangan sewa)	-	-
Aset jaminan BDL dan PKPS	-	-
Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	64	30.341.227.055
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2015)	**272**	**85.328.090.117**

Berdasarkan hasil penelusuran aset eks BPPN tersebut selama periode 2016-2019, telah ditemukan 24 aset dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Unit	Nilai (Rp)
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2015)	**272**	**85.328.090.117**
Hasil Penelusuran TA 2016-2019:		
Terjual di BPPN dan PPA	3	912.345.839
Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA		
Sita Kejaksaan dan Indikasi Sita		
Aset Sewa yang digunakan Bank (tercatat dengan keterangan sewa)		
Aset jaminan BDL dan PKPS	1	0
Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	20	10,800,137,076
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2020)	**248**	**73.615.607.202**

Dengan demikian, sisa aset properti eks BPPN yang perlu ditelusuri adalah sebanyak 248 aset senilai Rp73.615.607.202.

b. Aset Nostro

Dalam rangka penelusuran Aset Nostro, Direktorat PKNSI telah melakukan beberapa kegiatan, antara lain berupa:

1) Pengelolaan Aset Nostro yang Tersimpan di Bank Indonesia

DJKN melalui surat Nomor S-1376/KN.5/2014 s.d. S-1381/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014, Direktorat PKNSI telah meminta informasi kepada Bank Indonesia dan 5 Bank Dalam Negeri dimaksud, terkait keberadaan rekening nostro eks. BBO/BBKU di bank-bank tersebut. PT Bank Mutiara mengkonfimasi rekening tersebut serta telah menyetorkannnya ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) pada tanggal 18 September 2014 dan PT Bank BCA, Tbk Cabang Solo meminta tambahan data mengenai rekening tersebut. Sedangkan tiga bank lainnya (Citibank, BRI, dan BPR Tri Sejahtera Makmur) tidak memberikan tanggapan.

Menanggapi surat Direktorat PKNSI, DJKN nomor S-2369/KN.5/2014 tanggal 30 September 2014, Bank Indonesia melalui surat nomor 16/156/DPTP tanggal 26 November 2014,menyatakan bahwa rekening eks Bank Ficorinvest dan Bank Tata sebesar Rp8.840.515.509 dan Rp1.187.712.121 merupakan koreksi fasilitas diskonto dan koreksi overdraft (bukan aset nostro eks. BBO/BBKU) namun demikian BI masih melakukan penelitian dan penelusuran. Untuk rekening senilai Rp406.733.525.331,33 BI belum menemukan informasi mengenai data dimaksud. Sedangkan untuk rekening Bank Indover, tidak terdapat nama bank eks. BBO/BBKU yang mengklaim dana ke Bank Indover, namun demikian sebagai informasi terdapat tagihan Pemerintah kepada Trustee Indover Bank senilai EUR 338.538,20 yang berstatus *dispute*.

Selanjutnya, melalui surat undangan nomor UND-57/KN.5/2017 tanggal 25 Februari, DJKN mengundang Bank Indonesia untuk melakukan rapat pembahasan dana nostro di Bank

Indonesia pada tanggal 5 Maret 2014. Dalam rapat tersebut, Bank Indonesia menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a) Dalam sistem penatausahaan rekening Bank Indonesia, saat ini tidak tercatat rekening atas nama eks. Bank BDNI. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia meminta informasi yang lebih rinci atas rekening dimaksud berupa nomor rekening, nama rekening, nominal dan periode penyimpanan, untuk melakukan pengecekan apakah pernah ada rekening atas nama Bank BDNI di Bank Indonesia dan apabila ada bagaimana proses penutupan rekening tersebut. Sesuai penjelasan Bank Indonesia, penutupan rekening dilakukan setelah rekening tersebut bersaldo nol.
b) Berdasarkan Dokumen Daftar Klaim dari Trustee Indover Bank per tanggal 20 Oktober 2009 yang disampaikan Bank Indonesia, diketahui bahwa terdapat tagihan Pemerintah RI c.q. Kementerian Keuangan kepada Trustee Indover Bank yang berasal dari dana eks. BBO/BBKU dengan nilai sebesar EUR 338.538,20 yang berstatus dispute, dengan Person in Charge (PIC) Biro Bantuan Hukum Setjen Kemenkeu, namun berdasarkan Dokumen Daftar Klaim per tanggal 10 September 2010, tagihan Kementerian Keuangan tersebut telah bersaldo nol.
c) Bank Indonesia saat ini menatausahakan rekening eks. Bank Ficorinvest dan Bank Tata dengan nilai sebesar Rp10.028.227.629,98, namun dikarenakan kedua rekening tersebut dibuka oleh internal Bank Indonesia terkait fasilitas diskonto dan koreksi overdraft maka Bank Indonesia masih memerlukan waktu untuk melakukan penelitian dan penelusuran atas dana di kedua rekening tersebut.

2) Pengelolaan Aset Nostro yang Tersimpan di Bank Ganesha

Tersimpan dan terkonfirmasi rekening eks BDR di Bank Ganesha sebesar Rp5.841.796.415, namun PT Bank Ganesha juga menyatakan memiliki tagihan kontijensi kepada eks. BDR sebesar Rp51.447.560.083.

Melalui surat Nomor S-2586/KN.5/2014 tanggal 15 Oktober 2014, DJKN telah meminta PT Bank Ganesha untuk menyetorkan dana eks BPPN yang tersimpan di PT Bank Ganesha ke rekening KUN. Melalui surat Nomor 277/Dir/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014, PT Bank Ganesha menyampaikan bahwa terdapat kewajiban PT Bank Ganesha kepada eks BDR sebesar Rp5.841.796.415, namun PT Bank Ganesha juga memiliki tagihan kontijensi kepada eks. BDR sebesar Rp51.447.560.083 sehingga secara set off eks BDR masih mempunyai kewajiban membayar kepada PT Bank Ganesha sebesar Rp45.605.763.668.

Melalui surat Nomor S-35/KN.5/2015 tanggal 8 Januari 2015 dan dan S-1157/KN.5/2015 tanggal 15 April 2015, DJKN telah meminta PT Bank Ganesha untuk menyetorkan kewajibannya kepada eks BDR sebesar Rp5.841.796.415 ke Kas Negara karena dana tersebut tidak dapat dilakukan set off sedangkan tagihan PT Bank Ganesha kepada eks BDR sebesar Rp51.447.560.083 penyelesainya dilakukan melalui mekanisme APBN dan harus didukung dengan dokumen yang lengkap.

Melalui surat nomor S-200/KN.5/2015 tanggal 16 Februari 2016, DJKN telah mengundang PT Bank Ganesha untuk melakukan pembahasan, namun PT Bank Ganesha tidak hadir. Atas ketidakhadiran tersebut, melalui surat No.088/DIR/II/16 tanggal 23 Februari 2016, PT Bank Ganesha menyampaikan permintaan waktu untuk memastikan dan melengkapi data.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.05/2005, program penjaminan yang dilaksanakan oleh BPPN dengan memberikan jaminan terhadap pembayaran Bank Umum telah berakhir sejak tanggal 22 September 2005, dengan demikian maka tagihan Bank Ganesha kepada Bank BDR sudah tidak dijaminkan pemerintah sehingga sehingga set off dengan dana Bank BDR tidak dapat dilakukan. Berkenaan dengan hal tersebut, melalui surat nomor S-2369/KN.5/2016 tanggal 23 Desember 2016, DJKN telah meminta kembali Bank Ganesha untuk menyetorkan dana Bank BDR ke Kas Negara, namun sampai dengan tanggal penyajian Laporan Keuangan ini, Bank Ganesha belum menyetorkan dana eks. BDR tersebut ke Kas Negara.

Melalui surat nomor S-772/KN.5/2019 tanggal 5 September 2019 dan S-624/KN.5/2020 tanggal 21 Juni 2020, DJKN kembali meminta Bank Ganesha untuk menyetorkan dana BDR ke Kas Negara dan menyampaikan bahwa tagihan kontinjensi Bank Ganesha tidak dapat dibayarkan. Sebagai tanggapan atas surat nomor S-624/KN.5/2020 tanggal 21 Juni 2020, telah dilakukan koordinasi dengan Bank Ganesha dan disepakati pencairan dana eks BDR sebesar Rp5.841.796.415 akan dilakukan secara bertahap selama 10 kali pembayaran dengan jangka waktu pembayaran selama 10 tahun.

Pada tanggal 8 Oktober 2020 ditandatangani perjanjian dengan Bank Ganesha untuk kesepakatan pembayaran dana BDR yang dilakukan bertahap selama 10 kali, dimulai sejak tahun 2020 dan berakhir tahun 2029 dengan jumlah pembayaran angsuran masing-masing sebesar Rp584.179.641,50 yang jatuh tempo setiap tanggal 1 Desember.

a. Pembayaran tahap I pada tanggal 1 Desember 2020. Melalui surat nomor S-1196/KN.5/2020 tanggal 19 November 2020, telah disampaikan surat penagihan pembayaran I kepada Bank Ganesha. Atas perjanjian tersebut telah dilakukan pembayaran tahap I pada tanggal 30 November 2020 sebesar Rp584.179.642,00 (NTPN EFE9F48VUA3TIN28).
b. Pembayaran tahap II pada tanggal 1 Desember 2021 sebesar Rp584.179.642,00 (NTPN 4277E2G4UU94Q4BT).
c. Pembayaran tahap III pada tanggal 22 November 2022 sebesar Rp584.179.642,00 (NTPN 3E86D6QR9C4NU3PM).
d. Pembayaran tahap IV pada tanggal 28 November 2023 sebesar Rp584.179.642,00 (NTPN 1578F0JUNU9CNA4G)

3) Pengelolaan Aset Nostro yang Tersimpan di Clearstream Banking SA

Rekening eks. Bank BIRA di Clearstream Banking SA senilai USD 258.438,50 telah terkonfirmasi sebagai Aset Nostro eks BPPN .Saat ini rekening tersebut masih dalam tahap pengembalian ke Kas Negara.

Melalui surat nomor S-1125/KN.5/2019 tanggal 29 November 2019, DJKN telah meminta Clearstream Banking SA untuk melakukan transfer dan penutupan rekening Bank BIRA pada Clearstream Banking SA, namun belum mendapat balasan dan tindak lanjut dari Clearstream Banking SA.

DJKN kembali menyurati Clearstream Banking SA melalui surat nomor S-725/KN.5/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang kemudian mendapatkan balasan melalui surat elektronik, sehingga

komunikasi dengan Clearstream Banking SA dapat dilakukan dua arah. Pihak Clearstream meminta specimen tanda tangan pihak yang berwenang dalam pencairan dana Bank BIRA dan dilegalisasi oleh notaris publik. Sedang dalam proses pembuatan dokumen dimaksud.

Clearstream Banking SA telah mencairkan dana Bank BIRA dan telah tercatat masuk ke Kas Negara pada tanggal 18 Desember 2020 senilai Rp3.655.871.021 (No. Dok. Penerimaan 9186676352FS) sehingga pengelolaan asset nostro Bank BIRA pada Clearstream Banking SA telah selesai.

c. SURAT BERHARGA EKS BPPN

Pada tanggal 29 s.d. 31 Juli 2013, Tim Pemeriksa BPK RI telah melakukan pemeriksaan fisik atas Saham dan Surat Berharga milik Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang disimpan di kustodi Citibank. Hasil pemeriksaan fisik surat berharga di Kustodi Citibank yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik BPK RI adalah sebagai berikut:

1) Terdapat kekeliruan pada data surat berharga yang disampaikan oleh pihak DJKN yakni pada kolom jumlah lembar karena berdasarkan cek fisik dan wawancara dengan pihak Citibank kolom tersebut tidak menunjukan jumlah lembar melainkan nilai total coupun atau nilai principal dari surat berharga yang bersangkutan.
2) Terdapat perbedaan dan kesalahan klasifikasi jenis surat berharga yaitu masukan ke dalam Goverment Bond namun setelah dilakukan cek fisik dan wawancara dengan pihak Citibank surat berharga tersebut masuk kedalam Corporate Bond.
3) Sebagian besar surat berharga yang ada tidak mempunyai principal, hanya terdapat Coupon saja, sehingga tidak diketahui secara pasti tanggal jatuh tempo dari obligasi (principal) tersebut serta beberapa Coupun yang ada sudah melewati masa jatuh tempo.
4) Surat Berharga milik DGS Finance International sudah dihapuskan dari Market Trading Hongkong karena nilainya sudah nihil dan perusahaannya sudah tidak ada lagi.

Penyajian surat berharga eks BPPN telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik BPK RI tersebut di atas yaitu terdapat penyesuaian akun Goverment Bond yang di reclass ke Corporate Bond serta pencatatan Corporate Bonds Dgs International Finance Co dengan nilai Rp0 kerena telah dihapuskan Market Trading Hongkong.

d. ASET SAHAM EKS BPPN

Penyajian nilai aset saham yang disimpan di Kustodi Citibank didasarkan pada nilai saham yang disajikan pada Monthly Report Citibank per 31 Desember 2021.

Pengelolaan aset saham yang disimpan di Kustodi Citibank meliputi pencatatan saham, monitoring melalui Monthly Report, serta mencatat atau mengkoordinasikan pembagian dividen.Tim Pemeriksa BPK RI telah melakukan pemeriksaan fisik atas Saham dan Surat Berharga milik Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang disimpan di kustodi Citibank.Pada saat pemeriksaan tersebut berdasarkan infomasi dari Citibank, diketahui bahwa sebagian perusahaan yang sahamnya di simpan di di kustodi Citibank telah tidak beroprasi lagi.

Berdasarkan hasil penelusuran diketahui 14 saham yang disimpan di kustodi Citibank Jakarta berstatus aktif dan saat ini masih diperdagangkan di BEI. Melalui surat Nomor S-1348/KN.5/2014 s.d. S-1353/KN.5/2014 dan Nomor S-1367/KN.5/2014 s.d. S-1375/KN.5/2014 tanggal 16 Juni

2014, Direktorat PKNSI telah meminta konfirmasi kepada para emiten penerbit saham tersebut, atas kepemilikan saham eks. BPPN tersebut. Namun hingga akhir periode penyusunan Laporan Keuangan, hanya 9 emiten dari 15 emiten yang disurati, yang menjawab surat Direktorat PKNSI tersebut. Dari 9 emiten yang memberikan tanggapan hanya 2 emiten yang mengkonfirmasi kepemilikan saham eks. BPPN sedangkan emiten lainnya tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham eks. BPPN dan hanya menginformasikana nama Biro Administrasi Efeknya masing-masing. Untuk aset saham eks BPPN yang status emitennya belum diketahui, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PKNSI melalui surat Nomor S-1233/KN.5/2014 tanggal 28 Mei 2014 telah meminta informasi kepada Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kemenkumhan atas status emiten tersebut, namun belum mendapat tanggapan.

Terkait saham PT Mulia Industrindo, Tbk berdasarkan hasil penelitian dokumen, 50.000.000 lembar saham PT Mulia Industrindo, Tbk yang tersimpan di Kustodi Citibank bukan merupakan aset eks. BPPN (Bank Bira). Berdasarkan Agency Agreement tanggal 15 Desember 1996, diketahui bahwa 30.000.000 lembar saham tersebut merupakan milik Willow Overseas Investment Limited, dan berdasarkan Placement Agreement tanggal 4 April 1997, diketahui 20.000.000 saham PT Mulia tersebut merupakan milik Crestlawn Ltd, Saham tersebut telah dikembalikan kepada Ery Yunasri & Partners selaku kuasa Willow Overseas Investment Limited dan Crestlawn Ltd.

Berdasarkan surat PT Datyndo Entricom selaku Biro Adminstrasi Efek emiten nomor DE/X/2014-7152 tanggal 9 Oktober 2014, diketahui saham PT Reksadana Perdana, Tbk dh. PT BDNI Reksadana telah berubah bentuk menjadi unit KIK Reksadana Prima dengan jumlah konversi atas saham 80.000.000 lembar saham milik Kementerian Keuangan adalah menjadi 29.625.788 unit KIK. Saat ini pengkonversian saham milik Kementerian Keuangan menjadi unit KIK Reksadana Prima belum dilakukan.

Pada tahun 2018 dilakukan reklasifikasi aset saham PT Sukarpaja Estetika Padang Golf dari aset saham eks BPPN menjadi aset saham eks kelolaan PT PPA. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan Laporan Keuangan perseroan. Berdasarkan Laporan Keuangan perseroan tahun buku 2015, diketahui terdapat pencatatan Pinjaman Subordinasi perseroan kepada Kementerian Keuangan cq. DJKN dh. PT PPA (Persero). Pinjaman Subordinasi tersebut dapat dikonversi menjadi Transferable Membership.

Pada tahun 2020 saham PT Karabha Digdaya telah diserahkan pengelolaannya kepada Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan sesuai Surat Perintah Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor PRIN-25.1/KN/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan Berita Acara Serah Terima tentang Pengelolaan Aset Saham Nomor BA-1/KN.2/2020 tanggal 23 Januari 2020.

e. ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA

Aset Properti eks kelolaan PT PPA adalah aset properti yang berasal dari BPPN yang tidak terkait perkara di peradilan (free and clear) yang semula diserahkelolakan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) kemudian dikembalikan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) kepada Menteri Keuangan sesuai berita acara serah terima tanggal 27 Februari 2009 dan tidak diserahkelolakan kembali oleh Menteri Keuangan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

Sesuai PMK Nomor 154/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Aset Eks BPPN oleh Menteri Keuangan sebagaimana diubah melalui PMK Nomor 230/PMK.06/2022, Pengelolaan Aset Properti eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dilakukan dengan cara penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan, penjualan, pelepasan hak dengan pembayaran kompensasi kepada Pemerintah, hibah, penetapan status penggunaan, izin menempati sementara, penyertaan modal negara, pemanfaatan, penyerahkelolaan kepada badan layanan umum di bidang pengelolaan aset, pengadaan jasa yang berkaitan dengan Aset Properti dalam hal diperlukan, pemusnahan, penghapusan, bongkaran, dan/atau penilaian.

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 mengungkapkan permasalahan antara lain aset properti eks kelolaan PT PPA belum disajikan dengan nilai wajar dan agar penyajian aset properti eks kelolaan PT PPA diseragamkan dengan penyajian aset properti eks BPPN dimana aset properti eks BPPN disajikan sesuai jumlah dokumen yang dikuasai Kementerian Keuangan c.q. DJKN (antara lain Sertifikat, Girik, AJB, dsb) sedangkan aset properti eks kelolaan PT PPA disajikan sesuai kode PRK yang berasal sejak awal penyerahan dari PT PPA kepada Kementerian Keuangan c.q. DJKN, oleh karena itu, dilakukan penilaian terhadap sisa aset properti eks kelolaan PT PPA serta penyajian jumlah aset properti eks kelolaan PT PPA disesuaikan dengan penyajian aset properti eks BPPN.

Aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero) yang didukung dengan asli dokumen kepemiilkan (sertifikat /covernote) disajikan di Neraca sebesar nilai wajar, sedangkan yang tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan.

Adapun aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero) yang dibukukan namun tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau covernote) per 31 Desember 2021 adalah sebanyak 557 aset dengan nilai sebesar Rp1.725.818.297.515, sedangkan per 31 Desember 2022 adalah sebanyak 546 aset dengan nilai sebesar Rp1.658.969.374.443. Aset properti yang belum didukung dengan asli dokumen kepemilikan dan/atau covernote sebagai berikut:

Uraian	Jumlah unit	Nilai (Rp)
BJDA Diragukan (Dokumen berupa AJB,APHT, Copi Dokumen Kepemilikan, PPJB, Risalah Lelang, IMB)	546	1.658.969.374.443

f. ASET SAHAM (NON BANK) EKS KELOLAAN PT PPA

Aset saham PT Bina Prima Perdana yang merupakan perusahaan yang termasuk dalam Grup Texmaco tidak lagi masuk dalam draft perjanjian pengelolaan aset kepada PT PPA, sehingga direklasifikasi dari aset saham yang diserahkelolakan kepada PT PPA menjadi aset saham non bank eks kelolaan PT PPA.

Pada tahun 2016, aset saham PT Asia Natural Resources Tbk, PT Jemblo Cable Company Tbk, PT Sukapraja Estetika Padang Golf tidak diserahkelolakan kembali kepada PT PPA dan dicatat sebagai aset saham eks kelolaan PT PPA yang dikelola oleh DJKN. Saat ini perdagangan saham PT Asia Natural Resources Tbk di bursa telah di-suspend oleh BEI.

Pencatatan kepemilikan pemerintah pada PT. Tuban Petrochemical Industries (TPI) dicatat sebagai Investasi Permanen pada BA 999.03. Kepemilikan pemerintah pada PT. TPI pada dasarnya adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pada saatnya, pemerintah akan melepaskan kepemilikannya kepada pihak yang tepat.

Pengelolaan PMN berupa aset saham pada PT. TPI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan aset eks badan khusus yang dibentuk dalam rangka penyehatan perbankan, sebagaimana Pasal 4 PP No. 66 Periode Tahun 2020. Pengelolaan aset eks BPPN pada dasarnya dalam rangka recovery atas BLBI yang sudah dikeluarkan.

Pada Tahun 2020 saham PT Sejahtera Eka Graha telah diserahkan pengelolaannya kepada Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan BA 999.03 Aset Investasi sesuai Surat Perintah Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor PRIN-25.1/KN/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan Berita Acara Serah Terima tentang Pengelolaan Aset Saham Nomor BA-1/KN.2/2020 tanggal 23 Januari 2020.

g. Pengungkapan Penting Terkait Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA (Persero) menjadi PMN pada PT. TPI:

1) Kepemilikan saham Pemerintah pada PT TPI

a) Salah satu aset kredit eks BPPN yang dikelola oleh Menteri Keuangan cq. DJKN adalah piutang kepada TPI dalam bentuk *Multi Years Bond (MYB)* yang diterbitkan oleh TPI, dan Menteri Keuangan sebagai satu-satunya Pemegang Obligasi (*MYB Holder*). TPI merupakan suatu *holding company* yang bergerak di bidang industri petrokimia yang dibentuk pada tahun 2004, sebagai tindak lanjut restrukturisasi yang dilakukan oleh BPPN terhadap utang-utang Grup Silakencana Tirtalestari. Struktur kepemilikan TPI pada saat terbentuk adalah sebesar 70% dimiliki oleh BPPN, dan sebesar 30% dimiliki oleh PT Silakencana Tirtalestari (PT ST). Setelah TPI terbentuk, langkah selanjutnya dari kesepakatan restrukturisasi adalah diterbitkannya *MYB* oleh TPI, dan BPPN adalah sebagai satu-satunya *Bond Holder*.

b) Berdasarkan Keppres Nomor 15 tahun 2004, Menteri Keuangan kemudian menggantikan kedudukan BPPN sebagai pemegang saham di TPI, dan sekaligus juga sebagai *MYB Holder*. Sampai dengan saat ini, DJKN telah melaksanakan pengelolaan aset kredit dimaksud dengan berpedoman kepada ketentuan pengelolaan aset eks BPPN, dengan tujuan utama untuk mewujudkan *recovery* aset kredit yang pada dasarnya merupakan piutang negara.

c) Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan petrokimia Indonesia, diambil suatu tindakan strategis dalam konteks pengelolaan aset kredit eks BPPN, yaitu melakukan konversi utang *(MYB)* menjadi saham Menteri Keuangan di TPI dengan melakukan konversi utang TPI, sejalan dengan isi Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Millik Negara/Daerah, yang menegaskan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari badan khusus yang dibentuk dalam rangka penyehatan perbankan, diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan.

d) Konversi utang TPI pada dasarnya adalah strategi DJKN dalam pengelolaan aset kredit eks BPPN, sebagaimana Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT Tuban Petrochemical Industries, yang berbunyi bahwa pengelolaan penyertaan modal negara berupa aset saham dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan aset eks Badan Khusus yang dibentuk dalam rangka penyehatan perbankan.

e) Mengacu pada Sistem Akuntansi Pemerintah (vide. PP71 dan aturan turunannya), maka kepemilikan saham pemerintah pada TPI sebesar Rp2.908.409.694.537 dalam bentuk penyertaan modal negara, dicatatkan menjadi bagian dari investasi pemerintah berupa Investasi Permanen, sehingga DJKN mencatat pada BA 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah. Sedangkan sisa utang TPI sebesar Rp811.643.881.275 tetap dicatatkan pada BA 999.99 Transaksi Khusus.

f) Penyertaan Modal Negara pada PT TPI pada saatnya nanti akan diserahkan kepada PT PERTAMINA Persero dengan maksud agar PT TPI dapat lebih berkembang.

2) Mutasi Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA (Persero)

a) Rincian perubahan nilai pokok MYB per tahun sampai dengan dikonversi
Perubahan nilai pokok MYB disebabkan adanya pembayaran angsuran oleh TPI (tahun 2005 s.d. 2017) dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Saldo Awal (Utang Pokok MYB)	Mutasi (Angsuran Pokok)	Saldo Akhir
2004	3.266.000.000.000	0	3.266.000.000.000
2005	3.266.000.000.000	(11.000.000.000)	3.255.000.000.000
2006	3.255.000.000.000	0	3.255.000.000.000
2007	3.255.000.000.000	(50.000.000.000)	3.205.000.000.000
2008	3.205.000.000.000	0	3.205.000.000.000
2009	3.205.000.000.000	(35.000.000.000)	3.170.000.000.000
2010	3.170.000.000.000	(85.000.000.000)	3.085.000.000.000
2011	3.085.000.000.000	(130.000.000.000)	2.955.000.000.000
2012	2.955.000.000.000	(126.765.000.000)	2.828.235.000.000
2013	2.828.235.000.000	(50.215.738.593,06)	2.778.019.261.406,94
2014	2.778.019.261.406,94	(90.526.680.949)	2.687.492.580.457,94
2015	2.687.492.580.457,94	(32.610.184.030)	2.654.882.396.427,94
2016	2.654.882.396.427,94	(36.640.901.891)	2.618.241.494.536,94
2017	2.618.241.494.536,94	0	2.618.241.494.536,94

b) Dasar penilaian aset yang diserahkan untuk dikelola PT PPA sebesar Rp873.811.488.440,40

- Berdasarkan Perjanjian Serah Kelola dari Kemenkeu kepada PT PPA (Persero), Nilai Aset merupakan nilai atas Aset yang diserahkelolakan yang ditetapkan oleh Menkeu pada tanggal serahkelola berdasarkan hasil penilaian yang masih berlaku.
- Nilai Aset tersebut ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 69/KMK.06/2008, dengan rincian sebagai berikut:

No	Aset Kredit	Nominal	Nilai Aset
1	Multi Years Bond (MYB)	3.266.000.000.000	1.024.000.000.000
2	Mandatory Convertible Bond (MCB)	4.167.000	497.813.000.000
Total Nilai Aset (Saldo Akhir 2008)			1.521.813.000.000

- Adapun mutasi Nilai Aset selama diserahkelolakan kepada PT PPA (Persero) tahun 2009 s.d. 2017 adalah sebagai berikut:

	Nilai Aset	Keterangan
Saldo Awal (2009)	1.460.570.023.902,64	Selisih sebesar Rp61,2M (1.521.813.000.000-1.460.570.023.902,64), karena pengaruh penurunan Nilai Aset. Awalnya Nilai Aset MYB dihitung dengan nilai pokok 3.266.000.000.000, namun dinilai ulang menjadi 3.205.000.000.000 karena adanya pembayaran tahun 2005 dan 2007.
Mutasi (2009 s.d. 2017)	(586.758.505.463,06)	Angsuran pokok selama tahun 2009 s.d. 2017
Saldo Akhir (2017)	873.811.488.440,40	

- Nilai Saldo akhir digunakan sebagai nilai pada saat diserahkelolakan kepada PT PPA, sebagai dasar dalam penghitungan Imbalan Pengelolaan Aset/Imbalan Kinerja kepada PT PPA.

- Ketika pengelolaan aset dikembalikan oleh PT PPA kepada Kemenkeu, maka saldo Aset Kredit menggunakan jumlah utang *as is* TPI dikurangi dengan pembayaran angsuran pokok. Dengan demikian, hubungan antara Nilai Aset yang dikelola oleh PT PPA sebesar Rp873.811.488.440,40 dengan utang pokok MYB TPI sebesar Rp3.266.000.000.000 yang dikelola oleh DJKN sebagai berikut:

Keterangan	Utang Pokok (DJKN)
Saldo Awal	3.266.000.000.000
Saldo 2009	3.205.000.000.000
Mutasi (2009 s.d. 2017)	(586.758.505.463,06)
Saldo Akhir (2017)	2.618.241.494.536,94

c) Mutasi saldo dari Rp873.811.488.440,40 menjadi Rp811.643.881.275 dan Perhitungan bunga dan penalti MYB TPI sebesar Rp811.643.881.275

- Sebagaimana telah dijelaskan di atas, saldo sebesar Rp873.811.488.440,40 merupakan saldo akhir Nilai Aset yang dikelola oleh PT PPA per 31 Desember 2017, yang kemudian dengan pengembalian pengelolaan aset kepada Kemenkeu, maka saldo Aset Kredit menggunakan jumlah utang *as is* TPI dikurangi dengan pembayaran angsuran pokok.

- Sementara saldo sebesar Rp811.643.881.275 merupakan saldo utang bunga dan penalti (*unconverted portion MYB*) per 31 Desember 2019, dengan keterangan:

Tanggal	Transaksi	Angsuran	Saldo
30/12/2018	Saldo Bunga+Penalti		733.924.166.667
31/03/2019	Saldo Bunga+Penalti		767.787.633.619
30/09/2019	Saldo Bunga+Penalti		836.643.881.275
20/11/2019	Angsuran	(5.000.000.000)	831.643.881.275
19/12/2019	Angsuran	(20.000.000.000)	811.643.881.275

Cat: Pembayaran bunga dan pinalti dilakukan 2 kali dalam setahun (setiap tanggal 27 Februari dan 27 Agustus). Dalam periode 30 Desember 2018 s.d. 30 September 2019, TPI tidak melakukan pembayaran angsuran. Atas keterlambatan tersebut, TPI dikenakan pinalti yang berakibat meningkatnya saldo utang dari Rp733.924.166.677 menjadi Rp836.643.881.275

3) Penjelasan atas koreksi dan penyerahan aset kredit eks kelolaan PT PPA (Persero) atas nama Grup Texmaco

Aset kredit Grup Texmaco telah diserahkan ke PUPN DKI Jakarta melalui KPKNL Jakarta III dengan Surat Nomor S-840/KN/KN.5/2021 tanggal 22 Oktober 2021 hal Penyerahan Pengurusan Piutang Negara Grup Texmaco; dengan jumlah hak tagih sebesar Rp.31.722.860.855.522 dan USD.3.912.137.146,21. Atas penyerahan tersebut, KPKNL melakukan penelitian, dan meminta konfirmasi atas selisih *outstanding* sebesar USD 1,21. Setelah dilakukan penelitian kembali, PKNSI menyampaikan konfirmasi atas besaran outstanding, dengan surat nomor S-2327/KN.5/2021 tgl. 18 November 2021, yg mengkonfirmasikan *outstanding* utang sebesar Rp.31.722.860.855.522 dan USD.3.912.137.145. Setelah mendapatkan konfirmasi, PUPN kemudian menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara an. Grup Texmaco, dengan *outstanding* utang sebesar Rp.31.722.860.855.522 dan USD.3.912.137.145.

Terkait pengakuan dan pengukuran Aset eks Kelolaan PT PPA (Persero), khususnya terkait aset kredit Group Texmaco pada LKBUN TK BLBI Tahun 2020, sebagaimana diatur dalam PMK No. 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK No. 127/PMK.05/2018, diatur bahwa Aset eks Kelolaan PT PPA (Persero) diakui pada saat berakhirnya perjanjian serahkelola antara PT PPA (Persero) dengan Menteri Keuangan sebagaimana Berita Acara Pengembalian Aset dari PT PPA (Persero) kepada Menteri Keuangan Tahun 2009, diatur pula bahwa aset kredit eks Kelolaan PT PPA (Persero) diukur sebesar nilai yg belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Outstanding Utang Grup Texmaco sebagaimana diserahkan piutangnya kepada PUPN didasarkan pada Surat Direktur PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) nomor S-590/PPA/ID/0415 tanggal 24 Juni 2015. Hal tersebut sebagaimana permintaan konfirmasi dari Direktorat PKNSI kepada PT PPA (Persero) melalui surat Nomor: S-1379/KN.5/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan surat nomor S-1309/KN.5/2021 tanggal 10 Juni 2021.

4) Penyelesaian Aset Kredit Eks Kelolaan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

Pada Tahun 2023 telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia (d.h. PT Perusahaan Perdagangan Indoenesia) pada tanggal 29 Desember 2023. Dalam PP dimaksud disetujui bahwa nilai penambahan penyertaan modal negara ke dalam saham PT RNI sebesar Rp2.564.710.242.000,00 yang terdiri dari:

a) Konversi piutang pokok negara berupa Rekening Dana Investasi (RDI) dan *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) sebesar Rp1.955.049.413.943,56,
b) Konversi piutang pokok negara berupa aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebesar Rp609.660.827.108,12.

Nilai sebagaimana huruf b tersebut merupakan nilai utang PT PT Perusahaan Perdagangan Indoenesia yang tercatat di dalam neraca LKBUN TK Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI. Dengan adanya PMN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2023 tersebut yang mengkonversi piutang negara menjadi penyertaaan modal negara maka sisa utang PT Perusahaan Perdagangan Indonesia telah selesai.

3. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA TERKAIT ASET BERPERKARA

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.01/2014 tentang Penugasan Kepada Unit-Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Aset-Aset eks BPPN, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, dan eks Pengelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 428/KMK.01/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Biro Bantuan Hukum Dalam Penanganan Sisa Tugas Tim Koordinasi Penyelesaian Tugas-Tugas Tim Pemberesan BPPN, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, dan Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, aset eks BPPN yang terkait perkara hukum di lembaga peradilan penanganannya dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Biro Bantuan Hukum.

4. PENGUNGKAPAN PENTING TERKAIT INVENTARISASI KELENGKAPAN DATA, DOKUMEN KEPEMILIKAN DAN PERALIHAN, SERTA PENGUASAAN FISIK ATAS ASET EKS BLBI

Kementerian Keuangan telah melakukan pemetaan terhadap aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero). Pemetaan atas aset properti eks BPPN dan eks PT PPA (Persero) masih berdasarkan data rekapitulasi aset properti yang disandingkan dengan arsip dokumen penguasaan dan pengalihan yang dimiliki Kementerian Keuangan berdasarkan hasil inventarisasi dan verifikasi terhadap berkas/dokumen aset properti eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada tahun 2009 dan 2011, dengan hasil sebagai berikut:

a. Pemetaan Aset Properti eks BPPN
   1) Terdapat 188 unit aset senilai Rp975.847.375.874 yang dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan

2) Terdapat 1.070 unit aset senilai Rp1.588.417.106.561,70 yang dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan.
3) Terdapat 222 unit aset senilai Rp772.705.684.688,20 yang tidak dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan namun dilengkapi dengan dokumen peralihan.
4) Terdapat 708 unit aset yang tidak dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan.

b. Pemetaan Aset Properti eks kelolaan PT PPA (Persero)
1) Terdapat 1.171 unit aset senilai Rp4.043.772.167.044 yang dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan.
2) Terdapat 279 unit aset senilai Rp963.954.085.344 yang dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan.
3) Terdapat 28 unit aset senilai Rp174.129.254.000 yang tidak dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan namun dilengkapi dengan dokumen peralihan.
4) Terdapat 543 unit aset senilai Rp1.702.047.726.443 yang tidak dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan.

Berdasarkan hasil penelusuran lebih lanjut atas data dan dokumentasi yang ada diketahui bahwa:
a. Aset properti yang ada dokumen sertifikatnya namun masa berlaku sertifikatnya sudah berakhir sebanyak 474 aset.
b. Aset properti yang tidak bersertifikat (hanya ada bukti Girik, SPH, AJB) sebanyak 533 aset.
c. Aset properti yang dikuasai/diokupasi oleh pihak ketiga sebanyak 803 aset.

Seluruh aset properti telah dilakukan pengamanan secara yuridis melalui kantor pertanahan. Pada tahun 2022 telah dilakukan pemasangan papan nama pengamanan pada aset properti eks BPPN dan eks PT PPA (Persero) sebanyak 510 unit.

Saat ini, Kementerian Keuangan sedang melakukan inventarisasi dan penelusuran atas dokumen kepemilikan atau peralihan dan penguasaan aset Properti, sebagai dasar penyajian aset properti eks BPPN dan eks PT PPA (Persero) tersebut pada Laporan Keuangan selanjutnya. Terhambatnya penyelesaian inventarisasi terjadi karena adanya himbauan Work From Home (WFH) serta adanya PSBB DKI Jakarta selama beberapa waktu yang meniadakan kegiatan inventarisasi dan verifikasi. Selain itu, terdapat beberapa pegawai yang dinyatakan positif terpapar COVID-19 (adanya cluster Gudang Kustodi DJKN), sehingga perlu dilakukan penutupan dan sterilisasi kustodi selama beberapa minggu.

Kegiatan inventarisasi yang dilakukan tahun 2020 dan masih berlangsung sampai dengan tahun 2022, belum sepenuhnya selesai dan belum dilakukan reviu oleh APIP, sehingga aset properti yang disajikan pada Neraca belum berdasarkan hasil inventarisasi dokumen. Hasil inventarisasi aset properti akan digunakan setelah kegiatan inventarisasi selesai dan dilakukan reviu oleh APIP, serta akan disajikan pada Neraca Tahun 2023.

5. PENGUNGKAPAN PENTING TERKAIT PEMANFAATAN ASET PROPERTI EKS BPPN DAN EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO)

Aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) telah dilakukan optimalisasi dalam bentuk pemanfaatan berupa sewa. Sampai dengan Tahun 2022, jumlah persetujuan sewa yang

ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa adalah sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) persetujuan, dengan total PNBP sebesar Rp36.625.387.551.

6. PENGUNGKAPAN PENTING TERKAIT PENGGUNAAN ASET PROPERTI EKS BPPN DAN EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA

Terhadap sebagian aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) telah dilakukan penetapan status penggunaan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kementerian/Lembaga. Sejak tahun 2009 hingga tahun 2022, telah dilakukan penetapan status penggunaan sebanyak 236 aset, dengan total nilai sebesar Rp1.161.066.841.930.

7. PENGUNGKAPAN PENTING TERKAIT SERAH KELOLA ASET PROPERTI EKS BPPN DAN EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) KEPADA LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA

Salah satu bentuk pengelolaan aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) adalah dengan melakukan serah kelola aset properti kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (Negara). Sejak tahun 2016 hingga tahun 2022, jumlah serah kelola yang telah ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima adalah sebanyak 332 aset, dengan total nilai sebesar Rp5.906.202.574,00. Selanjutnya, sebanyak 19 aset senilai Rp37.951.161.800,00 di antaranya telah dilakukan penarikan kembali.

Pada tahun 2020, Dirjen Kekayaan Negara, melalui surat yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor S-190/KN/2020 tanggal 17 Maret 2020, kembali mengusulkan 16 lokasi untuk tujuan penyediaan rumah ASN, TNI, dan Polri serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sesuai surat Kementerian PUPR Nomor RU.0104-DR/404 tanggal 17 April 2020, Kementerian PUPR sedang melakukan verifikasi lebih lanjut.

8. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA TERKAIT ASET EKS BDL

Atas Piutang eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) pada 20 (dua puluh) BDL baik eks Dana Talangan maupun eks Unit Program Penjaminan Pemerintah (UP3) sebesar Rp9.804.501.675.703,36, Pemerintah dhi. Kementerian Keuangan menguasai dokumen dan fisik atas aset eks BDL berupa aset kredit, aset inventaris, surat berharga dan aset properti eks BDL dengan total Rp12.595.333.766.453,56. Berdasarkan PMK Nomor 185/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi oleh Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan c.q. DJKN mengelola aset Eks BDL tersebut dengan melakukan penjualan aset, pelunasan kredit, sewa, menjadikan sebagai BMN, kemudian hasil pengelolaan menjadi pengurang nilai Piutang BDL.

Aset adalah harta atau kekayaan eks Bank Dalam Likuidasi (BDL). Nilai sisa aset eks BDL yang dikelola Pemerintah per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.595.333.766.453,56. Aset eks BDL terdiri dari aset kredit, aset inventaris, Aset surat berharga, dan aset properti eks BDL.

Rincian aset eks BDL per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023
1	Aset Kredit	10.897.165.792.765,00
2	Aset Inventaris	1.342.300,00
3	Aset Surat Berharga	1.524.031.350,00
4	Aset Properti eks BDL	1.696.642.600.038,56
	Jumlah	**12.595.333.766.453,56**

Rincian lebih lanjut atas Pengungkapan Penting Lainnya Terkait Aset Eks BDL dicatat pada Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Aset yang Timbul dari Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), sebagai berikut:

a. ASET KREDIT EKS BDL

Aset kredit adalah hak Pemerintah yang berasal dari tagihan BDL terhadap debiturnya. Pengelolaan atas aset kredit meliputi penatausahaan dan penyerahan pengurusan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Untuk pelaporan pengelolaan aset kredit yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN, dilakukan rekonsiliasi aset kredit paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester antara Direktorat dengan PUPN/Kantor Pelayanan. Sisa aset kredit eks BDL yang dicatatkan per 31 Desember 2023 adalah sejumlah 7.969 debitur dengan saldo akhir sebesar Rp10.897.165.792.765,00.

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023
1	Aset kredit yang telah diserahkan pengurusan piutang negaranya kepada PUPN	8.330.125.652.285,00
2	Aset kredit yang ditatausahakan oleh DJKN	2.567.040.140.480,00
	Jumlah	**10.897.165.792.765,00**

b. ASET INVENTARIS EKS BDL

Aset inventaris adalah aset yang berupa barang selain tanah dan/atau bangunan, termasuk kendaraan bermotor, yang merupakan aset milik BDL. Pengelolaan atas aset inventaris meliputi penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan, lelang, penetapan sebagai Barang Milik Negara (BMN), dan pemusnahan. Sisa aset inventaris eks BDL yang dicatatkan per 30 September 2023 adalah sejumlah 54 unit dengan nilai sebesar Rp1.342.300. Aset Inventaris eks BDL berupa peralatan dan mesin sejumlah 54 unit tersebut berasal dari aset eks PT Bank Asiatic (dalam likuidasi).

Adapun rincian Aset Inventaris eks BDL sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023
1	Kendaraan Bermotor	0
2	Peralatan dan Mesin	1.342.300
	Jumlah	**1.342.300**

c. ASET SURAT BERHARGA EKS BDL

Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, yang merupakan aset milik BDL. Pengelolaan atas surat berharga meliputi penatausahaan, permintaan konfirmasi kepemilikan, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO), permintaan pembayaran atas dividen saham atau bunga, pencairan obligasi, dan penjualan. Sisa aset surat berharga eks BDL yang dicatatkan dengan nilai sebesar Rp1.524.031.350.

Adapun rincian Aset Surat Berharga eks BDL sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023
1	Obligasi	0
2	Saham	1.524.031.350
	Jumlah	**1.524.031.350**

d. ASET PROPERTI EKS BDL

Aset properti adalah aset berupa tanah dan/atau bangunan, dan/atau satuan rumah susun/apartemen berikut benda yang melekat dan merupakan satu kesatuan, yang merupakan aset milik BDL. Pengelolaan atas aset properti eks BDL meliputi penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan, lelang, penebusan, penetapan aset properti menjadi Barang Milik Negara (BMN), dan pemanfaatan dalam bentuk sewa. Sisa aset properti eks BDL yang dicatatkan per 30 September 2023 adalah sejumlah 671 aset dengan nilai sebesar Rp1.757.972.548.038,56.

Adapun rincian Aset Properti eks BDL sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023
1	Aset tetap	302.614.116.000
2	Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA)	840.512.390.038,56
3	Aset yang diperoleh berdasarkan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukun tetap	224.390.154.000
4	Aset yang berasal dari penyerahan Pemegang Saham kepada BDL untuk menyelesaikan permasalahan permodalan dan likuiditas BDL	329.125.940.000
	Jumlah	**1.696.642.600.038,56**

9. SATUAN TUGAS PENANGANAN HAK TAGIH DANA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA

Penyelesaian penagihan dana BLBI yang tidak kunjung selesai selama lebih dari dua puluh tahun menjadi perhatian khusus pemerintah sehingga diperlukan satu kekuatan baru yang dapat mendukung istrumen yang sudah berjalan selama ini, yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam pemulihan hak negara. Bukti keseriusan pemerintah untuk memulihkan hak negara adalah dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 jo. Keppres Nomor 16 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang diinisiasi oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Satgas BLBI dibentuk dengan tujuan utama untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti secara efektif dan efisien. Satgas BLBI yang terdiri dari berbagai Kementerian dan Lembaga berkomitmen melakukan upaya *extraordinary* untuk mengembalikan hak negara dengan total 110,45 triliun rupiah dimana lebih dari 90% dari nilai tersebut merupakan aset kredit dari obligor/debitur. Sehingga pembentukan Satgas

BLBI adalah sebagai katalisator dalam penyelesaian hak negara atas dana BLBI serta memperkuat fungsi PUPN.

Satgas BLBI terdiri dari gabungan Kementerian dan Lembaga bertugas dengan waktu yang terbatas hingga 31 Desember 2023, memiliki struktur keanggotan sebagai berikut:

1. Pengarah (terdiri dari 8 orang Menteri dan Pimpinan Lembaga Negara)
2. Ketua Pelaksana Satgas (Dirjen Kekayaan Negara)
3. Wakil Ketua Satgas (Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung RI)
4. Sekretaris (Deputi Bidkor Hukum dan HAM, Kemenkopolhukam)
5. Anggota Pelaksana (9 orang Pejabat Eselon I antar Kementerian dan Lembaga)
6. Sekretariat yang berkedudukan di Kementerian Keuangan c.q. DJKN diketuai oleh Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi DJKN
7. Kelompok Kerja (Pokja):
    a. Tim A, B, dan C. Masing-masing tim terdiri dari gabungan tiga Pokja yaitu Pokja Data dan Bukti, Pokja Pelacakan, dan Pokja Penagihan dan Litigas
    b. Pokja Tanah
    c. Pokja Peraturan
    d. Tim Penegakkan Hukum Bareskrim POLRI.

Dalam pelaksanaan tugasnya, tim Pokja Satgas melakukan telaah dan pendalaman terhadap obligor, debitur, dan aset properti dengan nilai yang signifikan dan kompleksitas permasalahan yang tinggi. Terkait penanganan penagihan obligor/debitur, mekanisme pemanggilan yang dilakukan adalah sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak antar panggilan berselang 7 hari, dalam hal obligor/debitur tidak memenuhi panggilan, maka akan dilakukan pemanggilan berselang 7 (tujuh) hari melalui media massa nasional.

Untuk tahap awal, Satgas BLBI bertugas untuk menangani sejumlah 8 obligor, 14 debitur, dan 9 unit aset properti prioritas dengan nilai yang besar dan tingkat permasalahan yang kompleks. Saat ini proses pengelolaan hak tagih negara dari dana BLBI sudah memasuki tahap kedua dengan prioritas penanganan kepada 13 obligor, 15 debitur, dan 14 unit aset properti.

Selain upaya penagihan melalui pemanggilan, Satgas juga melakukan serangkaian upaya terkait aset-aset obligor/debitur seperti penguasaan fisik dan pemblokiran aset-aset milik debitur dan obligor yang ditindaklanjuti dengan penyitaan dan pelelangan. Sejak dilantik pada tanggal 4 Juni 2021, Satgas BLBI telah efektif melaksanakan *special mission* penanganan hak tagih negara hingga 31 Desember 2023.

Dengan jangka waktu yang relatif singkat tersebut, Satgas telah berhasil membukukan capaian perolehan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Progres	Nilai (Rp)	Luas (m2)
1	PNBP dari Pembayaran	1.158.981.515.023,97	0,00
2	PNBP dari Lelang	77.144.119.998,60	0,00
3	PNBP Penjualan Tanpa Lelang	92.400.000.000,00	6.933,00
4	Penguasaan Fisik Aset Properti	9.704.373.565.544,00	20.252.837,64
5	Sita Aset dan Penyerahan Barang Jaminan	17.383.229.219.638,00	18.847.431,38
6	PSP dan Hibah	4.435.412.990.449,00	3.789.490,00
7	PMN Nontunai	3.769.371.406.872,00	670.837,00
Total		**36.620.912.817.525,60**	**43.567.529,02**

E. PIUTANG DALAM RANGKA DANA ANTISIPASI PENANGANAN LUMPUR SIDOARJO

1. Dasar Pembayaran Jual Beli Tanah dan Bangunan Peta Area Terdampak (PAT) 22 Maret 2007

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang UAKPA BUN Tk Pengelola Piutang dalam rangka Dana Antisipasi Penanganan Lumpur Sidoarjo pasal 15 ayat (1):

"Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta area terdampak tanggal 22 maret 2007, dengan akta jual beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah".

Ayat (2):

"Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta area terdampak 4 Desember 2006, 20% (dua puluh perseratus) dibayarkan dimuka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak 2 (dua) tahun habis"

PT Lapindo Brantas Inc. (LBI) merupakan badan hukum asing, sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat melakukan jual beli atas tanah dan bangunan di Indonesia. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, dibentuk PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ). Di dalam pelaksanaannya, proses pembayaran pelunasan jual beli tanah dan bangunan di wilayah PAT 22 Maret 2007 yang dilakukan PT MLJ tidak lancar Berdasarkan Peraturan Presiden no. 76 tahun 2015 tentang pemberian dana antisipasi untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan milik masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam PAT 22 Maret 2007, Pemerintah menyiapkan dana sebagai pelunasan pembayaran langsung kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan dalam PAT 22 Maret 2007. Dana yang telah digunakan tersebut menjadi pinjaman Lapindo Brantas Inc/PT Minarak Lapindo Jaya kepada Pemerintah.

2. Kebijakan Pembayaran Jual Beli Tanah & Bangunan PAT 22-03-2007

Sesuai dengan tata cara pembayaran yang di atur dalam Perpres 14 tahun 2007 tentang UAKPA BUN Tk Pengelola Piutang dalam rangka Dana Antisipasi Penanganan Lumpur Sidoarjo, pembayaran dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap I sebesar 20% dari nilai jual beli dan tahap II sebesar 80% dari nilai jual beli.

Kebijakan MLJ dalam pelaksanaan pembayaran pembelian tanah dan bangunan milik warga PAT 22 Maret 2007 adalah sebagai berikut:

a. Pembayaran tahap I 20%, seluruhnya dibayar secara tunai kepada warga.
b. Pembayaran tahap II 80%, dibagi menjadi tiga jenis pembayaran sebagai berikut:
    1) 80% seluruhnya dibayar secara tunai kepada warga
    2) Program Resettlement dengan formula tanah pekarangan/darat mendapat relokasi dengan perbandingan 1:1 dari luas tanah asal + bangunan seluas tertentu (yang dibangun PT Wahana Artha Raya) + "susuk" (kembalian) sebesar nilai sisa dari luas bangunan menurut data Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB), dengan tidak memperhitungkan uang muka 20%.

Warga yang menerima program resettlement, setelah 12 (dua belas) bulan diberikan kesempatan untuk menjual kembali kepada MLJ (buyback) dengan nilai yang sama.
Dalam perhitungan selanjutnya, uang muka 20% yang tidak diperhitungkan dalam program resettlement, dianggap pemberian uang kerohiman dalam bentuk bonus yang diberikan MLJ kepada warga.

3) 80% dibayar secara tunai kepada warga dengan memperhitungkan sisa pokok KPR warga yang bersangkutan. Selanjutnya, sisa pokok KPR warga diselesaikan oleh MLJ kepada bank yang terkait.

3. Piutang

Piutang Pokok sebesar Rp773.382.049.559 merupakan penggunaan Dana Antisipasi tahun 2015. Telah dilakukan penagihan pinjaman dari BPLS atas Dana Antisipasi beberapa kali yaitu :

a. Surat no. PMS.04.02/293/2016 tanggal 4 Oktober 2016 tentang peringatan untuk penagihan atas Pinjaman Dana Antisipasi.
b. Surat no. PMS.04.02/281/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang peringatan II Penagihan Pinjaman atas Dana Antisipasi.
c. Surat dari kementerian keuangan no. S-1375/KN/2017 tanggal 29 September 2017 tentang Penagihan Kewajiban terkait Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo.
d. Surat no. PMS.04.02/56/2018 tanggal 27 Maret 2018 tentang Penagihan Kewajiban Terkait Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo.
e. Surat dari kementerian keuangan no. S-170/MK.6/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo.
f. Surat dari kementerian keuangan no. S-4946/KN/2018 tanggal 24 September 2018 tentang Pengihan Kewajiban terkait Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo.
g. Surat no. KU.01.12/PPLS/222 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Penagihan Kewajiban terkait Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo.
h. Surat dari kementerian keuangan no. S-1893/KN/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Penagihan Kewajiban terkait Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo.
i. Surat dari kementeria keuangan no. S-527/MK.6/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Peringatan Untuk Penagihan Atas Pinjaman Dana Antisipasi lumpur Sidoarjo.
j. Surat no. KU 0403-AI/63 tanggal 15 Maret 2021 tentang jumlah piutang Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo sampai dengan 31 Desember 2020.
k. Surat dari kementerian keuangan no. S-291/MK.6/2021 tanggal 12 Juli 2021 tetang peringatan Penagihan atas Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo.
l. Surat dari Kementerian Keuangan No S-50/KN.5/2022 Tanggal 24 Januari 2022 tentang Penyisihan Piutang Dana Antissipasi Lumpur Sidoarjo (DALS).
m. Surat dari kementerian keuangan no. S-15/KN/2022 tentang Penagihan Piutang Pemerintah Terhadap Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo (DALS).
n. Surat Kantor Jasa Penilai Publik SIH Wiryadi dan Rekan Nomor 016/SK/SIH/XII/2021 Tanggal 6 Desember 2021 tentang Surat Keterangan atas Laporan Penilaian.
o. Surat no. HM 0503-AI/170 tanggal 21 April 2022 tanggal 21 April 2022 tentang Konfirmasi Catatan piutang Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo.

p. Surat Kepada DJKN No. HM 0501-Al/93 tanggal 28 Februari 2023 tentang Konfirmasi Catatan piutang Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo.
q. Surat kepada PT. Lapindo Brantas, Inc/Pt. Minarak Lapindo Jaya No. KU 0403-Al/94 tanggal 28 Februari 2023 tentang Konfirmasi Catatan piutang Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo.
r. Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-53/KN/2023 tentang Penyerahan Pengurusan Piutang Negara Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo (DALS) a.n Lapindo Brantas, Inc, PT Minarak Lapindo Jaya dan Nirwan Bakrie.
s. Penyerahan Pengurusan Piutang Negara Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo (DALS) diterima oleh PUPN Cabang DKI Jakarta dengan diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) Nomor SP3N-246/PUPNC.10.05/2023 tanggal 29 Maret 2023 hal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara a.n. Lapindo Brantas Inc, PT Minarak Lapindo Jaya dan Nirwan D. Bakrie;
t. Melalui PUPN Cabang DKI Jakarta telah dilakukan pemanggilan terhadap LBI/PT MLJ yang terakhir dilakukan sesuai surat pemanggilan nomor S-1531/KNL.0705/2023 tanggal 4 Juli 2023 hal Panggilan terakhir atas nama Lapindo Brantas Inc (LBI), PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) dan Nirwan D. Bakrie, namun demikian pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo (DALS) belum dilakukan pelunasan.
u. Sesuai Surat dan Bukti Bayar Nomor 021/L.DIR/MLJ/LBI/IX/2023 tanggal 15 September 2023 hal Pemberitahuan Pembayaran.

Hasil penilaian kembali jaminan adalah sebagai berikut :

a. Tanah seluas 622,34 Ha sesuai Laporan Penilaian nomor : 00347/2.00113-00/PI/0561/1/IXI/2021 tanggal 4 Desember 2021 mempunyai nilai wajar sebesar (137.276.401.432) rupiah yang kemudian dianggap nol karena nilainya negatif.
b. Tanah seluas 22,85 Ha sesuai Laporan Penilaian nomor : 00348/2.013-00/PI/0561/1/IXI/2021 tanggal 4 Desember 2021 mempunyai nilai wajar 58.234.000.000 rupiah dan nilai ini yang kemudian digunakan untuk menghitung nilai penyisihan piutang yang dalam pertemuan tripartit antara BUN, DJKN dan PPLS disepakati sudah mencapai kualitas piutang macet.

F. PENGUNGKAPAN PENTING PIUTANG NEGARA ATAS YAYASAN SUPERSEMAR

Penyusunan laporan keuangan UAKPA BUN TK Pengelola Piutang kepada Yayasan Supersemar baru dilakukan pada tahun 2018 sebagai implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus. Berdasarkan ketentuan tersebut Direktorat PKNSI sebagai Unit Eselon II di DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara ditetapkan sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN TK) Pengelola Piutang Kepada Yayasan Supersemar.

Koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kejaksaan Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Kementerian Sekretariat Negara masih terus dilakukan dalam rangka menyelesaikan Piutang kepada Yayasan Supersemar. Terkait dengan aset yang belum dilakukan eksekusi, Direktorat PKNSI juga terus mendorong agar pihak-pihak tersebut segera melakukan eksekusi atas aset-aset Yayasan Supersemar yang telah dilakukan penyitaan dan melakukan penelusuran atas aset-aset lainnya. Di samping itu, DJKN

telah menawarkan bantuan jasa penilai di lingkungan DJKN untuk selanjutnya dapat melakukan penilaian atas aset yang telah disita.

Beberapa bentuk koordinasi terkait penyelesaian piutang yang telah dilakukan antara lain:

1. Telah diadakan rapat koordinasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 30 April 2019 dan 26 Juni 2019, dengan mengundang pihak-pihak terkait pada Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam perkara Yayasan Supersemar yaitu Presiden RI c.q. Kementerian Sekretariat Negara selaku principal, Kejaksaan selaku Kuasa Hukum Pemerintah RI, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan internal Kementerian Keuangan.
2. Dalam rangka menindaklanjuti keputusan rapat pada tanggal 26 Juni 2019, Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-1862/KN/2019 tanggal 10 Juli 2019 kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN dan Nomor S-1863/KN/2019 tanggal 10 Juli 2019 kepada Menteri Sekretaris Negara yang pada intinya meminta dukungan terkait penyerahan uang hasil eksekusi kasus Yayasan Supersemar ke Rekening Kas Umum Negara.
3. Kejaksaan menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan mengajukan permohonan eksekusi atas sebagian hasil eksekusi sebesar Rp242.404.759.586,77 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meminta petunjuk kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui surat Nomor W10-U3/1962/Hk.02/8/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang pada intinya berisi mengenai apakah pencairan dapat dilakukan terhadap sebagian hasil eksekusi atau menunggu hasil eksekusi secara keseluruhan.
4. Dalam rangka memperoleh dukungan dari Mahkamah Agung atas penyerahan Sebagian hasil eksekusi Supersemar, Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-2457/KN/2019 tanggal 25 Oktober 2019 kepada Wakil Mahkamah Agung Bidang Yudikatif yang pada intinya meminta dukungan terkait penyerahan uang hasil eksekusi kasus Yayasan Supersemar ke Rekening Kas Umum Negara. Selain itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara juga telah berkoordinasi langsung dengan Mahkamah Agung terkait rencana penyetoran sebagian hasil eksekusi ke kas negara.
5. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyerahkan hasil eksekusi kepada perwakilan Kementerian Sekretariat Negara selaku principal beserta Jaksa Pengacara Negara pada tanggal 28 November 2019. Selanjutnya pada tanggal yang sama, telah dilakukan penyetoran uang senilai Rp242.081.000.259 ke Kas Umum Negara. Adapun besaran uang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sebesar Rp242.404.759.586. Dengan demikian terdapat perbedaan antara uang yang telah disita dengan uang yang disetorkan ke kas negara sebesar Rp323.759.327.
6. Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-2816/KN/2019 tanggal 28 Desember 2019 yang pada intinya meminta Menteri Sekretaris Negara untuk berkenan menindaklanjuti penyelesaian sisa *outstanding* Piutang Yayasan Supersemar dengan mengeksekusi aset yang telah diletakkan sita berupa:
   a. Gedung Granadi di Jalan HR Rasuna Said Kav.8-9 Blok X/I, Jakarta Selatan (BA Sita Eksekusi No.72/Eks/Pdt/2015 jo No.904/Pdt.G/2007/PNJkt.Sel tanggal 23 November 2016);
   b. Sebidang tanah seluas 8.120 m2 (SHM No 263) di Jalan Raya Megamendung No 6 RT 03 RW 03 (BA Sita Eksekusi No 07/Pen.Pdt/PBT/Sita.Eks/2016/PN.Cbi jo. No.72/Eks.Pdt/2015 jo. No 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Desember 2016).
7. Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-19/KN/2020 tanggal 29 Januari 2019 kepada Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-

undangan Kementerian Sekretariat Negara dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang pada intinya meminta pihak-pihak tersebut untuk menindaklanjuti penyelesaian hak-hak negara dalam Piutang Yayasan Supersemar.

8. Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-220/KN/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan Nomor S-380/KN/2020 tanggal 08 Juni 2020 kepada Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang pada intinya meminta pihak-pihak tersebut untuk menindaklanjuti penyelesaian hak-hak negara dalam Piutang Yayasan Supersemar sekaligus menawarkan bantuan penilaian oleh Penilai DJKN.
9. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mengajukan usulan penilaian aset sebagaimana dimaksud pada poin Nomor 6 melalui surat Nomor B-313/G/Gp.2/06/2020 tanggal 17 Juni 2020 hal Permintaan Tindak Lanjut Penyelesaian Piutang Yayasan Beasiswa Supersemar. Teknis penilaian tersebut telah dibahas bersama Direktorat Penilaian dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara pada tangggal 7 Juli 2020 sesuai pelaksanaan Hukum Acara Perdata dengan mempertimbangkan factor keamanan.
10. Kejaksaan Agung telah menyampaikan surat permohonan penetapan penilai pemerintah kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk dapat melakukan penilaian aset di Jalan Raya Megamendung dalam rangka mendukung pelaksanaan lelang eksekusi (Surat Jamdatun Nomor B-368/G/Gp.2/07/2020 tanggal 14 Juli 2020).
11. Direktorat PKNSI telah menyampaikan surat Nomor S-958/KN.5/2020 tanggal 15 September 2020 yang pada intinya meminta progres tindak lanjut penilaian aset.
12. Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN melalui surat Nomor B-616/G/Gp.2/11/2020 tanggal 04 November 2020 hal Permohonan Bantuan Biaya Appraisal Aset Tanah dan Bangunan Dalam Perkara Yayasan Beasiswa Supersemar menyampaikan permintaan bantuan biaya penilaian aset sitaan oleh KJPP dalam perkara perdata Piutang Yayasan Supersemar.
13. Menindaklanjuti surat tersebut, Direktur PKNSI telah menyampaikan surat Nomor S-1171/KN.5/2020 tanggal 10 November 2020 yang pada intinya menyampaikan bahwa biaya penilaian aset sitaan Yayasan Supersemar akan dibebankan pada POK Direktorat PKNSI.
14. Direktorat PKNSI menunjuk KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan ditunjuk sebagai pelaksana penilaian aset yang telah diletakkan sita sebagaimana dimaksud pada poin Nomor 6. Kontrak pelaksanaan penilaian aset dilaksanakan pada mulai tanggal 23 November sampai dengan 14 Desember 2020.
15. KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan telah menyerahkan hasil penilaian aset sitaan sebagaimana dimaksud di atas. Selanjutnya, hasil penilaian tersebut akan digunakan sebagai dasar permohonan lelang sita pengadilan dari Kejaksaan Agung kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Cibinong.
16. Jamdatun melalui surat Nomor B-260/G/Gp.2/04/2021 tanggal 14 April 2021 meminta agar laporan penilaian Aset Granadi dan Aset Megamendung direvisi mengingat penilaian dilakukan sebelum ada penunjukan dari Ketua Pengadilan Negeri.
17. Menindaklanjuti surat tersebut, telah dilakukan pengambilan sumpah Tim Penilai Aset Granadi pada tanggal 20 Mei 2021 oleh Ketua PN Jaksel dan tanggal 4 Juni 2021 oleh Ketua PN Cibinong.
18. Berdasarkan Surat Direktur PKNSI Nomor S-1320/KN.5/2021 tanggal 15 Juni 2021, telah dimohonkan penilaian ulang berikut penambahan pengguna laporan penilaian (PN Jaksel, PN Cibinong, Jamdatun).

19. Rencana survei (inspeksi) lapangan dalam rangka penilaian dilaksanakan pada tanggal 7 dan 8 Juli 2021. Namun demikian, rencana tersebut harus ditunda mengingat daerah Jabodetabek sedang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna mencegah penyebaran Covid-19.
20. Tim Penilai KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan telah melakukan inspeksi lapangan terhadap Aset Megamendung pada tanggal 25 Agustus 2021 dan Aset Granadi pada tanggal 26 Agustus dan 6 September 2021. Laporan penilaian tersebut diserahkan kepada Direktorat PKNSI melalui surat Nomor 00194/2.0014-00/PI/11/0080/1/XI/2021 dan 00195/2.0014-00/PI/11/0080/1/XI/2021 tanggal 10 November 2021.
21. Direktorat PKNSI menyampaikan laporan penilaian dimaksud kepada Ketua PN Jakarta Selatan melalui surat Nomor S-2632/KN.5/2021 tanggal 26 November 2021 dan kepada Ketua PN Cibinong melalui surat Nomor S-2631/KN.5/2021 tanggal 26 November 2021 (tembusan Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN).
22. Di samping sitaan berupa uang dan aset tanah-bangunan, terdapat aset finansial yang telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 72/Eks.Pdt/2015 jo. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tgl 03 Januari 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No	Perusahaan	Jenis	Status	Keterangan
1	Plaza Indonesia Realty (PLIN)	Saham dan Deviden	Listing	Terdapat deviden sebesar Rp3.592.500.000 tahun 2012 s.d. 2015
2	PT Granadi	Saham dan Deviden	Non Listing	-
3	PT Wisma Kosgoro	Saham dan Deviden	Non Listing	-
4	PT Indocement Tunggal Prakarsa (INTP)	Saham dan Deviden	Listing	-
5	PT Indofood Sukses Makmur (INDF)	Saham dan Deviden	Listing	-
6	PT Bank Muamalat	Saham dan Deviden	Non Listing	-
7	PT Bank Danamon (BDMN)	Saham dan Deviden	Listing	-
8	Timber Dana Jakarta	Saham dan Deviden	Non Listing	-
9	PT Pelita Indonesia Baru	Saham dan Deviden	Non Listing	-
10	PT Tri Megah Sekuritas (TRIM)	Saham	Listing	-
11	PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912	Saham	Non Listing	-
12	Aset Yayasan Supersemar di PT Samuel Internasional	Saham	Non Listing	-
13	Rekening/Giro/Deposito an. Yayasan Supersemar dan/atau Supersemar Yayasan dan/atau Beasiswa Yayasan Supersemar di PT BPR Mitra Sejahtera Lestari Bekasi	Rekening/Giro/Deposito	-	

23. Direktorat PKNSI telah menyampaikan surat Dirjen KN Nomor S-4/KN/2022 tanggal 17 Januari 2022 kepada Kemsetneg dan Kejagung untuk menyelesaikan *outstanding* piutang Yayasan Supersemar, termasuk dan tidak terbatas pada pengajuan permohonan lelang eksekusi Pengadilan terhadap aset yang telah disita dan telah dilakukan penilaian.
24. Direktorat PKNSI telah melaksanakan rapat dengan Jamdatun, Kejagung dan Kedeputian Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kemsetneg pada tanggal 6 Februari 2022 dengan simpulan:
    a. Tindak lanjut penyelesaian piutang yang saat ini akan dilakukan adalah mendorong pelaksanaan lelang aset sitaan (aset Granadi dan Megamendung) dan pencairan saham-saham yang telah disita.
    b. JPN akan menyampaikan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri mengenai selisih uang yang telah dieksekusi dengan uang yang diserahkan/disetor, rencana lelang aset sitaan, dan pencairan saham.
25. Direktorat PKNSI telah menyampaikan surat Dirjen KN Nomor S-40/KN/2022 tanggal 23 Maret 2022 kepada Kemsetneg dan Kejagung yang pada intinya meminta penjelasan terkait selisih saldo yang dicairkan dengan saldo yang diserahkan serta sita eksekusi rekening lainnya jika ada.
26. Direktorat PKN telah menyampaikan surat Dirjen KN Nomor S-69/KN/2022 tanggal 17 Mei 2022 kepada Ketua PN Jakarta Selatan dan Ketua PN Cibinong untuk dapat mengajukan lelang eksekusi ke KPKNL setempat. Selanjutnya, telah disampaikan pula surat Dirjen KN Nomor S-70/KN/2022 tanggal 17 Mei 2022 kepada Jamdatun dan Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum untuk dapat menyampaikan progres tindak lanjut atas hasil penilaian aset yang telah disita tersebut, termasuk dan tidak terbatas pada upaya mendorong permohonan pelaksanaan lelang sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri.
27. Direktorat PKN telah melakukan beberapa kali koordinasi yaitu pada tanggal 09 Juni 2022, 12 Juli 2022, dan 14 Juli 2022 guna mendorong pelaksanaan lelang sita eksekusi dan penyetoran uang sisa hasil eksekusi dengan melibatkan Kementerian Sekretariat Negara selaku principal beserta Jaksa Pengacara Negara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Pengadilan Negeri Cibinong.
28. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyerahkan uang sisa hasil eksekusi kepada perwakilan Kementerian Sekretariat Negara selaku principal beserta Jaksa Pengacara Negara pada tanggal 14 Juli 2022. Selanjutnya pada tanggal yang sama, telah dilakukan penyetoran uang senilai Rp323.759.328 ke Kas Umum Negara.
29. Adapun progres terkait aset sitaan berupa tanah dan/atau bangunan serta aset finansial (aset saham) adalah sebagai berikut:
    a. Pengadilan Negeri Cibinong telah melaksanakan lelang eksekusi aset berupa tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Raya Megamendung No. 6 RT 03 RW 03 Kampung Citalingkup, Desa Megamendung, Bogor telah dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2022 melalui KPKNL Bogor. Namun demikian, tidak terdapat penawaran atas lelang tersebut (TAP). Lelang ulang akan dilaksanakan setelah terdapat pembaruan penilaian oleh KJPP (laporan penilaian berakhir pada tanggal 25 Agustus 2022).
    b. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memproses permohonan lelang eksekusi aset berupa tanah dan bangunan "Gedung Granadi" di Jl. HR. Rasuna Said Kav 8-9 Blok X/I, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan. Namun demikian, lelang belum dapat dilaksanakan mengingat laporan penilaian telah habis masa berlakunya.

c. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) PMK 213/PMK.06/2020, masa berlaku laporan penilaian atau laporan penaksiran yang digunakan se bagai dasar penetapan Nilai Limit paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penilaian atau penaksiran sampai dengan tanggal pelaksanaan lelang.
d. Mengingat diperlukan penilaian baru oleh KJPP, pelaksanaan penilaian akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 dengan pertimbangan tidak tersedianya dana.
e. Pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap aset finansial (aset saham) akan dilakukan setelah principal melakukan pembayaran panjar SKUM yang diestimasikan sebesar Rp19.100.000.

30. Terkait aset sitaan berupa saham, Direktur PKN telah menyampaikan surat kepada Direktur Perdata Ditjen AHU Nomor S-594/KN.4/2022 tanggal 02 November 2022 yang pada intinya memohon informasi kepemilikan Yayasan Supersemar dan/atau Supersemar Yayasan dan/atau Beasiswa Yayasan Supersemar pada aset yang telah ditetapkan sita eksekusi/pemblokirannya sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 72/Eks.Pdt/2015 jo. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tgl 03 Januari 2018.
31. Direktur Perdata menyampaikan surat Nomor AHU.2.UM.01.01-5288 tanggal 30 Desember 2022 yang pada intinya menyampaikan susunan pengurus dan pemegang saham terhadap perusahaan yang sahamnya disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 72/Eks.Pdt/2015 jo. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tgl 03 Januari 2018. Untuk kategori perusahaan terbuka, Yayasan Supersemar tidak tercatat sebagai pemegang saham pada perusahaan tersebut. Adapun untuk PT Granadi, PT Wisma Kosgoro, Timber Dana Jakarta, dan PT Pelita Indonesia Baru, Yayasan Supersemar tercatat sebagai pengurus dan/atau pemegang saham perusahaan dimaksud.
32. Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat PKN telah menyampaikan surat Nomor S-377/KN.4/2023 tanggal 9 Maret 2023 kepada KSEI mengenai permintaan informasi kepemilikan saham Yayasan Supersemar terhadap saham perusahaan terbuka sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 72/Eks.Pdt/2015 jo. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tgl 03 Januari 2018. Direktur Utama KSEI menyampaikan tanggapan melalui surat Nomor KSEI-1015/DIR/0423 tanggal 10 April 2023 yang pada intinya untuk memperoleh informasi mengenai kepemilikan saham Yayasan Supersemar diperlukan izin/persetujuan dari OJK.
33. Terkait adanya perbedaan rekening/deposito/giro bank yang belum dieksekusi, Direktorat PKN telah meminta penjelasan kepada Kemsetneg (principal) dan Jamdatun (JPN) melalui surat Nomor S-56/KN/2023 tanggal 28 Maret 2023. Jamdatun menindaklanjuti surat tersebut melalui surat Nomor B-304/G/Gp.2/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang pada intinya menyampaikan kendala eksekusi aset yang telah disita baik berupa rekening/deposito/giro bank, saham, maupun tanah/bangunan.
34. Selanjutnya, Direktorat PKN telah melakukan rapat bersama Kemsetneg (principal) dan Jamdatun (JPN) pada tanggal 30 Agustus 2023 guna meminta dukungan terkait rencana penilaian ulang aset Granadi dan Megamendung. Pengadaan KJPP dalam rangka penilaian ulang tersebut dibebankan pada DIPA Kantor Pusat DJKN POK Direktorat PKN. Proses revisi anggaran untuk pengadaan jasa KJPP telah disetujui dan saat ini dalam proses pengadaan.
35. KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan telah melakukan penilaian atas aset sitaan Yayasan Supersemar berupa Aset Granadi dan Aset Megamendung melalui penilaian terbatas (desktop valuation). Laporan penilaian tersebut diserahkan kepada Direktorat PKN melalui surat Nomor 00192/2.0014-00/PI/11/0080/1/XII/2023 dan 00193/2.0014-00/PI/11/0080/1/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023.

G. Aset PKP2B

1. Terdapat kontraktor PKP2B yang asetnya tidak/belum disajikan pada laporan keuangan Bendahara Umum Negara triwulan III TA 2023 pada PKP2B PT Indominco Mandiri Berdasarkan pasal 15 angka 1 Kontrak (perjanjian) Nomor 097.B.Ji/292/U/90 tanggal 5 Oktober 1990 antara pemerintah (dh. PN Batubara) dengan PT Indominco Mandiri, dinyatakan bahwa "peralatan (termasuk suku cadang) dan perlengkapan lainnya tersebut adalah milik Kontraktor." Dengan demikian aset PKP2B PT Indominco Mandiri tidak termasuk dalam BMN.
2. Pengakhiran Perjanjian PKP2B Generasi I
   Terdapat kontraktor PKP2B yang telah berakhir perjanjian PKP2B Generasi I dengan rincian sebagai berikut:
   a. Pada tahun 2020 PT Arutmin Indonesia melalui surat keputusan menteri ESDM nomor 221.K/33/MEM/2020 tanggal 2 November 2020 resmi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
   b. Pada tahun 2021 PT Kendilo Coal Indonesia melalui surat keputusan menteri ESDM nomor 60/1/IUP/PMA/2021 tanggal 14 September 2021 resmi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
   c. Pengakhiran perjanjian PKP2B Generasi I PT Tanito Harum didasarkan pada adanya putusan perkara kasasi Tata Usaha Negara dengan Nomor 581.K/TUN/2020 dari Mahkamah Agung dimana hasilnya menolak permintaan dari APBI selaku penggugat untuk membatalkan SK Menteri ESDM Nomor 101.K/30/MEM/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang pembatalan atas SK Menteri ESDM Nomor 07.K/30/MEM/2019 tentang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Perpanjangan Pertama sebagai kelanjutan operasi PKP2B PT Tanito Harum. Sesuai pasal 25 PMK 67/2012 tentang Pengelolaan BMN PKP2B, BMN wajib diserahkan kepada pemerintah apabila perjanjian telah berakhir dan/atau telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan.
   d. Pada tahun 2021 PT Kaltim Prima Coal melalui Surat Keputusan Menteri BKPM 90/1/IUP/PMA/2021 tanggal 31 Desember 2021 resmi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
   e. Pada tahun 2022 PT Multi Harapan Utama melalui Surat Keputusan Menteri BKPM 608/1/IUP/PMDN/2022 tanggal 1 April 2022 resmi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
   f. Pada tahun 2022 PT Adaro Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri BKPM 11/1/IUP/PMA/2022 tanggal 13 September 2022 resmi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
   g. Pada tahun 2022 PT Kideco Jaya Agung melalui Surat Keputusan Menteri BKPM 14/1/IUP/PMA/2022 tanggal 16 Desember 2022 resmi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
3. Pengakuan Properti Investasi dalam Laporan Keuangan ini sesuai surat Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Nomor S-111/KN.2/2023 tanggal 11 Mei 2023 hal Implementasi PSAP Nomor 17 Properti Investasi pada BMN PKP2B. Penyajian Aset pada IUPK kelanjutan operasi kontrak/perjanjian pada PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT

Multi Harapan Utama, PT Kideco Jaya Agung, PT Adaro Indonesia dan IUPK Operasi Produksi pada PT Tanito Harum masih disajikan sebagai Properti Investasi pada LK BUN TK PKP2B TA 2023.

4. Terhadap kewajiban PT Kendilo Coal Indonesia dalam rangka pemanfaatan kembali BMN yang telah dilakukan serah terima kepada Pemerintah dengan nilai IDR 1.972.745.000, dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. PT Kendilo Coal Indonesia telah membayarkan uang muka/panjar sebanyak IDR 1.700.000.000 pada tanggal 6 Juni 2018;
   b. Sejak diterbitkannya persetujuan pemanfaatan sewa dari Kementerian Keuangan, belum ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa definitif antara Kementerian Keuangan dengan PT Kendilo Coal Indonesia;
   c. Sejak September tahun 2021, status PT Kendilo Coal Indonesia berubah menjadi pemegang IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, dimana perubahan status ini telah ditindaklanjuti oleh Ditjen Minerba dengan menyerahkan aset untuk dapat dilakukan pencatatan pada Daftar Rincian Aset (DRA) PT Kendilo Coal Indonesia atas aset yang pernah diserahkan kepada Pemerintah tahun 2005;
   d. Dikarenakan PT Kendilo Coal Indonesia telah berubah status menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, maka PT Kendilo Coal Indonesia dikenakan kewajiban untuk membayar sewa BMN sesuai dengan aturan dalam PP Nomor 15 tahun 2022;
   e. Saat ini, PT Kendilo Coal Indonesia telah mengajukan Permohonan Pengembalian Dana Pembayaran Sewa BMN kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara DJKN Kemenkeu dengan No.015/KCI/BMN/JKT/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 dan dalam proses untuk ditanggapi oleh Dit. PKN DJKN Kemenkeu.
   f. Kementerian Keuangan melalui surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara nomor S-1799/KN.4/2023 tanggal 17 Oktober 2023 Hal Tindak Lanjut Permohonan Pengembalian Dana Pembayaran Sewa BMN menyatakan bahwa atas angsuran uang muka yang telah dibayarkan oleh PT Kendilo Coal Indonesia sebesar Rp. 1.700.000.000 tidak dapat dikembalikan kepada PT Kendilo Coal Indonesia. Dalam pencatatan Kertas Kerja, Pendapatan atas Sewa diterima dimuka dikoreksi pada Neraca.
5. Sesuai dengan PMK 188/PMK.05/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa BMN yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, penjenjangan Unit Akuntansi dan Konsolidasi Pelaporan Keuangan BMN PKP2B diilustrasikan sebagai berikut:

Penjenjangan unit akuntansi yang mencatat dan/atau melaporkan BMN PKP2B diilustrasikan dalam bagan berikut:

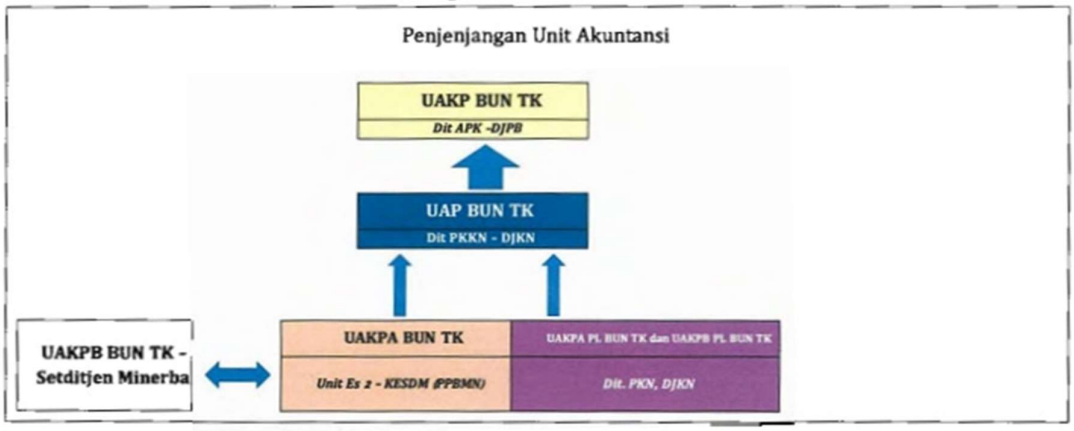

Pedoman Akuntansi BMN PKP2B ini mulai diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2022, sehingga pada penyusunan LK TA 2022 ini tidak lagi konsolidasi di Biro Keuangan KESDM.

	31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	31 Des 2023
PT Adaro Indonesia	637.408					637.408
PT Berau Coal	24.383.093	-	-	4.348.378	(8.813.314)	19.918.158
PT Multi Harapan Utama	75.240		(75.240)			-
PT Kideco Jaya Agung	29.714.218		(6.090.261)		(627.319)	22.996.638
PT Arutmin Indonesia	94.614.304		(334.655)		(10.506.762)	83.772.886
PT Kaltim Prima Coal	33.503.762		(886.496)		(5.817.087)	26.800.179
PT Kedilo Coal Indonesia	-					
TOTAL	182.928.024	-	(7.386.651)	4.348.378	(25.764.483)	154.125.269

6. Pengungkapan Lainnya
   a. Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor PKP2B yang diperoleh sampai dengan Tahun 2010 yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian dengan rincian sebagai berikut:
      Kontraktor PKP2B yang disajikan dalam mata uang USD
      1) Saldo Awal BMN sebesar USD182.928.024
      2) Mutasi kurang sebesar USD7.386.651 dikarenakan terdapat SK penghapusan dengan rincian sebagai berikut:
         a) SK Penghapusan dengan Nomor 316.K/BN.09/SJN.A/2023 tanggal 6 April 2023 tentang Penghapusan BMN Berupa Kendaraan Bermotor yang Berasal dari PKP2B PT Multi Harapan Utama, dimana dilakukan penghapusan pada CaLK sebesar USD 75.240;
         b) SK Menteri ESDM Nomor 466.K/BN.09/SJN.A/2022 tanggal 15 Mei 2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara yang Berasal dari PKP2B PT Kideco Jaya Agung di Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai sebesar USD 89.803 di CaLK;
         c) SK Menteri ESDM Nomor 61.K/BN.09/SJN.A/2023 tanggal 26 Januari 2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Kideco Jaya Agung di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai sebesar USD 41.950,13 di CaLK;
         d) SK Penghapusan dengan Nomor 7.K/BN.09/SJN.A/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Negara yang Berasal dari PKP2B PT Kaltim Prima Coal

Berupa Non Tanah di Kabupaten Sangatta, Provinsi Kalimantan Timur, dimana dilakukan penghapusan pada CaLK sebesar USD 886.495.

e) SK Penghapusan Menteri ESDM Nomor 855.K/BN.09/SJN.A/2023 tanggal 27 September 2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Arutmin Indonesia Berupa Barang Inventaris di Provinsi DKI Jakarta dengan nilai sebesar USD334.656 atau sebesar Rp2.922.056.900 di CaLK.

f) SK Penghapusan Menteri ESDM Nomor 1114.K/BN.07/SJN.A/2023 tanggal 18 Desember 2023 Tentang Penghapusan BMN yang berasal dari PKP2B PT Kideco Jaya Agung di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.

3) Koreksi tambah sebesar USD4.348.378 dikarenakan adanya koreksi pencatatan pada off balance sheet/CaLK dari Kategori BMN Non Tanah menjadi BMN Tanah.

4) Koreksi Kurang sebesar USD25.764.483 dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

a) Koreksi kurang pada PT Berau Coal sebesar USD8.813.314 dengan rincian:

I. Sebesar USD203.678 dikoreksi karena telah dilakukan IP BMN Non Tanah, sehingga naik ke Neraca.

II. Sebesar USD4.348.378 dikoreksi dari Non Tanah CALK ke Tanah CALK.

III. Sebesar USD4.261.258 dikoreksi karena telah dilakukan IP BMN Tanah sehingga naik ke neraca.

b) Koreksi kurang pada PT KJA sebesar USD627.319 karena telah dilakukan IP BMN non Tanah sehingga naik ke Neraca.

c) Koreksi Kurang pada PT Arutmin Indonesia sebesar USD10.506.763 terdiri atas:

IV. Sebesar USD10.194.580 dikoreksi karena telah dilakukan IP BMN Non Tanah sehingga naik keneraca

V. Sebesar USD312.183 Dikoreksi naik ke Neraca karena merupakan add cost kode aset yang telah ada di Neraca

VI. Koreksi kurang pada PT KPC sebesar USD5.817.087 karena telah dilakukan IP BMN Non Tanah sehingga naik ke Neraca.

5) Saldo Akhir BMN pada CALK yaitu sebesar USD154.125.269,00.

b. Kontraktor PKP2B yang disajikan dalam mata uang rupiah

	31 Des 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	31 Des 2023
PT Tanito Harum	4.540.684.961					4.540.684.961
PT Berau Coal	-	46.852.243.095			(45.997.935.829)	854.307.266
PT Kaltim Prima Coal	-	31.400.237.294			(209.267.052)	31.190.970.242
TOTAL	4.540.684.961	78.252.480.389	-	-	(46.207.202.881)	36.585.962.469

1) Saldo Awal PT Tanito Harum sebesar Rp4.540.684.961.

2) Terdapat Mutasi Tambah sebesar Rp78.252.480.389,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Sebesar Rp46.852.243.095,00 merupakan Nilai Perolehan Tanah sesuai dengan dokumen pendukung hasil verifikasi dokumen tanah TA 2023.

b) Sebesar Rp31.400.237.294,00 pada PT KPC terdiri atas:

I. Sebesar Rp209.267.052,00 merupakan nilai perolehan tanah terkait SUTT PT PLN sesuai dengan dokumen pendukung dengan tahun perolehan <2010;

II. Sebesar Rp31.190.970.242 merupakan nilai perolehan sisa bidang yang dilewati koridor Jalan SPRD.

3) Terdapat koreksi kurang sebesar Rp46.207.202.881,00 dengan rincian sebagai berikut:
   c) Sebesar Rp45.997.935.829 merupakan nilai perolehan tanah pada PT Berau Coal yang dikoreksi karena telah dilakukan Inventarisasi dan penilaian sehingga naik ke neraca sesuai nilai pada laporan penilaian;
   d) Sebesar Rp209.267.052,00 pada PT KPC merupakan nilai perolehan tanah yang dikoreksi karena telah dilakukan Inventarisasi dan penilaian sehingga naik ke neraca sesuai nilai pada laporan penilaian.
4) Sehingga saldo akhir PT Tanito Harum pada 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp36.585.962.469.

H. Aset KKKS

1. ASET KKKS PADA DJKN YANG TIDAK DISAJIKAN PADA NERACA PER 31 DESEMBER 2023

Selain aset yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2023 tersebut di atas, terdapat aset yang yang tidak memenuhi kriteria-kriteria penyajian di Neraca yaitu atas aset dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi Berupa Tanah yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja SPE Petroleum Ltd pada Wilayah Kerja Madura dari Kementerian ESDM kepada Kementerian Keuangan Nomor 416.BA/BN.05/SJA.4/2023 dan Nomor BA-9/KN.4/2023 yang berlokasi di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan Jawa Timur perolehan tahun 2009 dan 2010 dengan luas 211.762 m2 dan harga perolehan Rp 5.801.580.000,00 karena belum dilakukan proses Inventarisasi dan Penilaian (IP).

2. ASET KKKS PADA PPBMN YANG TIDAK DISAJIKAN PADA NERACA 31 DESEMBER 2023

a. Aset Tanah

Saldo Awal 1 Januari 2023	**0**
Mutasi Tambah :	**6.008.667.000**
Alih terima	6.008.667.000
Mutasi Kurang :	**6.008.667.000**
Alih serah	6.008.667.000
Saldo Akhir 31 Desember 2023	**0**

Penjelasan atas mutasi CALK Tanah adalah sebagai berikut:

1) Saldo awal merupakan aset tanah yang telah dilaporkan dalam CaLK LKPP Tahun 2022 (Audited).
2) Mutasi tambah sebesar Rp6.008.667.000,00 berasal dari alih terima aset tanah dari KKKS Star Energy Sentosa kepada KESDM sebesar Rp207.087.000,00 sesuai BAST nomor 295.BA/BN.05/SJA.4/2023 tanggal 17 Oktober 2023 dan dari KKKS SPE Petroleum Ltd. kepada KESDM sebesar Rp5.801.580.000,00 sesuai BAST nomor 415.BA/BN.05/SJA.4/2023 tanggal 8 Desember 2023.
3) Mutasi kurang sebesar Rp6.008.667.000,00 berasal dari penyerahan aset tanah pada KKKS Star Energy Sentosa dan KKKS SPE Petroleum Ltd. dari KESDM kepada Kementerian

Keuangan sesuai BAST nomor 416.BA/BN.05/SJA.4/2023 dan 417.BA/BN.05/SJA.4/2023 tanggal 8 Desember 2023.

b. Aset Non Tanah Berupa HBI

Terdapat aset HBI dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan oleh SKK Migas pada laporan 31 Desember 2022 serta belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP).

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
-	1,609.00	1,609.00	-

Penjelasan atas mutasi CALK HBI adalah sebagai berikut:

1) Saldo awal merupakan aset tanah yang telah dilaporkan dalam CaLK LKPP Tahun 2022 (Audited).
2) Mutasi tambah sebesar USD1,609.00 berasal dari alih terima aset HBI dari KKKS Kangean Energy Indonesia kepada KESDM sesuai BAST nomor 012.BA/92/SJA.4/2019 dan BAC-0312/SKKMH3000/2019/S7 tanggal 6 Maret 2019.
3) Mutasi kurang sebesar USD1,609.00 berasal dari alih serah aset HBI dari KESDM kepada KKKS PT MGA Utama Energi sesuai SK Penggunaan nomor 1030.K/BN.03/SJN.A/2023.

3. ASET KKKS PADA BPMA YANG TIDAK DISAJIKAN PADA NERACA PER 31 DESEMBER 2023

Selain aset KKKS yang disajikan pada Neraca LKBUN 31 Desember 2023 tersebut diatas, terdapat aset KKKS yang tidak disajikan dalam Neraca LKBUN TK yang Berasal dari KKKS per 31 Desember 2023 karena tidak memenuhi kriteria-kriteria penyajian di neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Aset Tanah

Saldo Awal 1 Januari 2023	**0**
Mutasi Tambah :	**38.319.948.531**
Koreksi berdasarkan Sertifikasi	38.319.948.531
Mutasi Kurang :	**0**
Alih serah	-
Saldo Akhir 31 Desember 2023	**38.319.948.531**

Mutasi CaLK Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp.38.319.948.531,00, terdiri dari:

1) Saldo awal periode 31 Desember 2022 Rp0,00;
2) Mutasi tambah sebesar Rp38.319.948.531,00 merupakan perhitungan nilai wajar hasil IP KKKS Pertamina Hulu Energi NSB.

b. Harta Benda Modal (HBM)

1) Aset sumur yang tidak digunakan

Terdapat 2 kategori aset sumur yaitu sumur yang masih digunakan dalam operasi dan sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi yang sudah di-plug and abandoned. Sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi ini disajikan secara off-balance-sheet dan disajikan berdasarkan hasil IP yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 s.d 2012. Total aset sumur

yang tidak digunakan per 31 Desember 2023 adalah senilai USD10,321,967.00 pada KKKS PHE NSB dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Aset HBM Berupa Aset Kondisi Rusak Berat

Jumlah KKKS	Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
1	-	10,321,967.00	-	10,321,967.00

Mutasi tambah sebesar USD10,321,967.00 berasal dari transfer masuk saldo awal UAKPA-PB

2) Aset Kondisi Rusak Berat

Aset kondisi rusak berat merupakan aset yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasi hulu migas. Total aset kondisi rusak berat per 31 Desember 2023 adalah senilai USD6,202,713 dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Aset HBM Berupa Aset Kondisi Rusak Berat

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
0	6,202,713.00	-	6,202,713.00

Mutasi tambah sebesar USD6,202,713.00 berasal dari transfer masuk saldo awal UAKPA-PB

3) Aset *Subsequence Expenditure* (SE)

Mutasi Aset HBM Berupa Aset SE

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
0	104,296,313.00	-	104,296,313.00

Mutasi tambah sebesar USD104,296,313.00 berasal dari transfer masuk saldo awal UAKPA-PB

4) Aset Perolehan sampai dengan Tahun 2010 yang dilaporkan BPMA pada 31 Desember 2023

Terdapat aset dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan oleh SKK Migas pada 31 Desember 2023 serta yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) sebagai berikut:

Mutasi Aset HBM Berupa Aset Belum di IP

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
0	196,391,845.00	3,229.40	196,391,845.00

Mutasi tambah asset terdiri dari transfer masuk saldo awal UAKPA-PB sebesar USD196,391,845.00 dan mutasi kurang yang berasal dari penghapusan asset KKKS Talisman Andaman B.V sebesar USD3,229.40.

5) Aset dalam proses penghapusan

Terdapat aset yang sudah terjual, namun belum dapat dihapuskan karena belum diperoleh surat hapus bukunya dari SKK Migas dan belum dilaporkan mutasi penghapusannya oleh KKKS sebagai berikut.

Mutasi Aset HBM Berupa Aset Dalam Proses Penghapusan

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
0	2,807,278.00	-	2,807,278.00

Mutasi tambah sebesar USD2,807,278.00 berasal dari transfer masuk saldo awal UAKPA-PB

c. Aset Harta Benda Inventaris

Terdapat aset HBI dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan oleh BPMA pada laporan 31 Desember 2023 serta belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP).

Mutasi HBI perolehan sebelum tahun 2010 yang belum dilakukan IP

Nilai Perolehan Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Nilai Perolehan 31 Desember 2023 (USD)
51,502.81	**-**	**-**	**51,502.81**

4. ASET KKKS PADA SKK MIGAS YANG TIDAK DISAJIKAN PADA NERACA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

Selain aset KKKS yang disajikan pada Neraca LKBUN 31 Desember 2023 tersebut di atas, terdapat aset KKKS yang tidak disajikan dalam Neraca LKBUN TK yang Berasal dari KKKS 31 Desember 2023 karena tidak memenuhi kriteria-kriteria penyajian di neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Aset Tanah

Penjelasan atas mutasi CaLK Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Awal 31 Desember 2022	**11.871.758.204.310,30**
Mutasi Tambah:	**430.413.648.349,03**
Koreksi Tambah Reklas dari CALK ke Neraca	5.802.466.490,00
Alih Kelola Terima dari KKKS	424.611.181.859,03
Mutasi Kurang:	**439.912.259.304,03**
Koreksi Pencatatan	1.171.960.533,25
Alih Kelola Serah Pengguna Barang	6.008.667.000,00
Alih serah pada KKKS	424.611.181.859,03
Reklas ke Neraca hasil IP/perubahan PIS	8.120.449.911,75
Saldo Akhir 31 Desember 2023	**11.862.259.593.355,30**

1. Saldo awal yang disajikan sebesar Rp11.871.758.204.310,00 merupakan saldo Laporan Keuangan BMN Hulu Migas UAKPA BUN TK Tahun 2022 audited.
2. Mutasi tambah Tanah sebesar Rp430.413.648.349,03 terdiri dari:
   a) Koreksi Tambah Reklas Tanah dari CALK ke Neraca sebesar Rp5.802.466.490,00 pada KKKS Medco E&P Grissik Ltd., SPE Petroleum Ltd. disebabkan hasil IP atau kesalahan pencatatan.
   b) Alih Kelola Terima sebesar Rp424.611.181.859,03 merupakan transaksi penyerahan Tanah yang berasal dari KKKS VICO Sanga Sanga kepada KKKS Alih Kelola PT. Pertamina Hulu Sanga Sanga sehubungan dengan berakhirnya Kontrak Kerja Sama dengan KKKS VICO Sanga Sanga Wilayah Kerja Sanga Sanga.
3. Mutasi kurang Tanah sebesar Rp439.912.259.304,03 terdiri dari:
   a) Koreksi pencatatan nilai perolehan Tanah sebesar Rp1.171.960.533,25 pada KKKS Medco E&P Grissik Ltd. dan PT Pertamina Hulu Sanga Sanga.
   b) Alih Kelola Serah Tanah kepada Pengguna Barang sebesar Rp6.008.667.000,00 pada KKKS SPE Petroleum Ltd. dan Star Energy Sentosa (Sebatik) Ltd.
   c) Alih Kelola Serah Tanah sebesar Rp424.611.181.859,03 yang berasal dari KKKS VICO Sanga Sanga kepada KKKS Alih Kelola PT. Pertamina Hulu Sanga Sanga sehubungan dengan berakhirnya Kontrak Kerja Sama dengan KKKS VICO Sanga Sanga Wilayah Kerja Sanga Sanga.
   d) Reklas dari CALK ke Neraca disebabkan hasil IP atau perubahan tanggal PIS sebesar Rp8.120.449.911,75 pada KKKS EMP Korinci Baru Ltd., Job Pertamina - Medco E&P Simenggaris, PT Medco E&P Indonesia, PT Medco E&P Tarakan, PT Sele Raya Belida, PT Odira Energy Karang Agung, Jindi South Jambi B Co. Ltd, TIS Petroleum E&P Blora Pte. Ltd., PT PHE Kalimantan A & Sangatta West CBM Inc.

b. Aset Harta Benda Modal

1) Aset sumur yang tidak digunakan

Terdapat 2 kategori aset sumur yaitu sumur yang masih digunakan dalam operasi dan sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi yang sudah di plug and abandoned. Sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi ini di off-balance dan disajikan berdasarkan hasil IP yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 s.d 2012. Total aset sumur yang tidak digunakan per 31 Desember 2023 adalah senilai USD28,868,861.00.

Saldo Awal 31 Desember 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2023
28,868,861.00	-	-	28,868,861.00

Tidak terdapat mutasi atas aset HBM Berupa Sumur yang Tidak Digunakan dari tahun 2022 dan 2023.

2) Aset Kondisi Rusak Berat

Aset kondisi rusak berat merupakan aset yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasi hulu migas. Total aset kondisi rusak berat per 31 Desember 2023 adalah sebesar USD41,487,768.00, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal 31 Desember 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2023
41,487,768.00	-	-	41,487,768.00

Tidak terdapat mutasi atas aset HBM Berupa Aset Kondisi Rusak Berat adalah Saldo awal yang disajikan sebesar USD41,487,768.00 merupakan saldo Laporan Keuangan BMN Hulu Migas UAKPA BUN TK Tahun 2022 audited Saldo awal yang disajikan sebesar USD41,487,768.00 merupakan saldo Laporan Keuangan BMN Hulu Migas UAKPA BUN TK Tahun 2022 audited.

3) Aset Subsequence Expenditure (SE)

Aset Subsequence Expenditure (SE) berasal dari kapitalisasi SE yang direklasifikasi ke neraca. Total Aset Subsequence Expenditure per 31 Desember 2023 adalah senilai USD489,707,715.70, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal 31 Desember 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2023
142,688,488.00	347,019,227.52	0.00	489,707,715.70

Penjelasan atas mutasi Aset HBM Berupa Aset SE adalah sebagai berikut:

a) Saldo awal yang disajikan sebesar USD142,688,488.00 merupakan saldo Laporan Keuangan BMN Hulu Migas UAKPA BUN TK Tahun 2022 audited.

b) Mutasi tambah sebesar USD347,019,227.52 merupakan SE yang aset induknya disajikan di CaLK pada KKKS:

No	Nama KKKS	Nilai (USD)
1	Premier Oil Natuna Sea B.V.	76,36
2	Minarak Brantas Gas Inc.	5.750,00
3	GENTING OIL KASURI PTE. LTD.	16.768,18
4	ENERGY EQUITY EPIC (SENGKANG) PTY. LTD.	27.160,00
5	PT BUMI SIAK PUSAKO	33.533,15
6	EXXONMOBIL CEPU LTD.	39.664,73
7	PT Pertamina Hulu Energi North Sumatera Offshore	59.580,46
8	SAKA INDONESIA PANGKAH LTD.	85.451,12
9	KALREZ PETROLEUM (SERAM) LTD.	193.892,33
10	CHEVRON MAKASSAR LTD.	278.167,43
11	EMP Bentu Ltd.	279.608,69
12	PT MEDCO E&P RIMAU	321.760,70
13	PT Pertamina Hulu Energi Ogan Komering	491.654,30
14	PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java	532.574,33
15	JOB Pertamina - Medco E&P Tomori Sulawesi	556.629,73
16	BP Wiriagar Ltd.	662.602,70
17	CITIC SERAM ENERGY LTD.	720.406,90
18	Petrogas (Basin) Ltd.	918.545,80
19	Petrochina International Bangko Ltd.	1.139.822,63
20	Medco E&P Grissik Ltd.	1.224.695,00
21	STAR ENERGY (KAKAP) LTD.	1.547.766,94
22	BP Muturi Holdings B.V.	1.975.164,96
23	PT Pertamina Hulu Energi Tuban East Java	2.234.265,56
24	PT MEDCO E&P INDONESIA	2.428.506,45
25	Petrochina International Jabung Ltd.	2.432.125,19
26	PT IMBANG TATA ALAM	3.300.858,40
27	BP Berau Ltd.	5.251.273,07
28	PT. Pertamina Hulu Rokan	7.242.957,20
29	PT. PERTAMINA EP	8.149.911,09
30	PT MEDCO E&P LEMATANG	8.668.129,85
31	PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore	17.095.741,98
32	PT Pertamina Hulu Sanga Sanga	17.537.803,00
33	PT Pertamina Hulu Attaka	42.575.425,08
34	PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	98.891.781,22
35	Medco E&P Natuna Ltd.	120.099.172,99
Total		**347.019.227,52**

c) Mutasi kurang sebesar USD70,900.00 berasal dari reklasifikasi menjadi Aset dalam Proses Penghapusan pada KKKS PT. Pertamina Hulu Rokan.

4) Aset Perolehan sampai dengan Tahun 2010 yang dilaporkan SKK Migas pada 31 Desember 2023

Terdapat aset dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) posisi per 31 Desember 2023 dengan total nilai USD5,827,210,645.16 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal 31 Desember 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2023
5,943,461,587.76	95,651,453.43	211,902,396.03	5,827,210,645.16

Penjelasan atas mutasi Aset HBM Berupa Aset Belum di IP adalah sebagai berikut:

a) Saldo awal yang disajikan sebesar USD5,943,461,588.00 merupakan saldo Laporan Keuangan BMN Hulu Migas UAKPA BUN TK Tahun 2022 audited.
b) Mutasi tambah sebesar USD95,651,453.43 merupakan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan KKKS dan atau koreksi pembenahan KKKS.
c) Mutasi kurang karena penghapusan/transfer out/koreksi pembenahan/alih serah/selisih pembulatan dan atau penjualan lelang sebesar USD 167,454,504.45.
d) Mutasi Kurang aset sebesar USD44,447,891.25 berasal dari aset yang telah dilakukan Inventarisasi dan Penilaian pada tahun 2022 - 2023 dan direklasifikasi ke neraca pada KKKS:

Kode KKKS	Nama KKKS	Nilai Perolehan (USD)
A19	Energy Equity Epic (Sengkang) Pty. Ltd.	25,168.89
A34	Job Pertamina–Medco Tomori Sulawesi	1,594,761.09
A36	Kangean Energy Indonesia Limited	10,629,547.14
A39	Exxonmobil Cepu Ltd.	3,978,789.17
A41	Montd'or Oil Tungkal Limited	2,125.00
A42	Pearl Oil (Sebuku) Ltd.	329,638.86
A57	PT. Medco E&P Lematang	25,561,396.84
A60	PT. Medco E&P Tarakan	442,235.21
A65	PT. Sele Raya Belida	4,097.16
A66	PT Spr Langgak	121,335.52
A73	Medco Energi Sampang Pty. Ltd.(*)	116,859.50
A75	Tately Palmerah N.V	504,071.04
A88	PHE Ogan Komering	1,101,591.91
A94	PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang	19,269.60
B167	PT. Rizki Bukit Barisan E&P	17,004.32
TOTAL		**44,447,891.25**

.

5) Aset dalam proses penghapusan

Terdapat aset yang sudah terjual, namun belum dapat dihapuskan karena belum diperoleh surat hapus bukunya dari SKK Migas atau surat keputusan penghapusan Kementerian ESDM dan terdapat aset dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusan oleh SKK Migas kepada Kementerian ESDM. Pada 31 Desember 2023 nilai aset dalam proses penghapusan adalah sebesar USD154,778,773.94 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal 31 Desember 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2023
16,400,374.54	139,436,902.88	380,084.32	154,778,773.94

Penjelasan atas mutasi Aset Dalam Proses Penghapusan adalah sebagai berikut:

a) Saldo awal yang disajikan sebesar USD16,400,375.00 merupakan saldo Laporan Keuangan BMN Hulu Migas UAKPA BUN TK Tahun 2022 audited.

b) Mutasi tambah sebesar USD139,436,902.88 merupakan reklasifikasi aset yang di off-balance ke CaLK dikarenakan sudah terjual lelang/dihibahkan/dialihstatuskan ke pihak ketiga pada 31 Desember 2021 namun belum diterbitkan Surat Hapus Buku yang diterbitkan oleh SKK Migas kepada KKKS yang bersangkutan atau kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusan oleh SKK Migas kepada Kementerian ESDM.

c) Mutasi kurang aset sebesar USD56,217.25 merupakan penghapusan BMN Hulu Migas yang telah terbit Surat Hapus Buku dari SKK Migas sebesar USD56,217.25.

d) Mutasi kurang aset sebesar USD323,867.07 merupakan reklasifikasi/koreksi catatan aset.

6) Aset Tidak Ditemukan

Pada Tahun 2023, terdapat aset tidak ditemukan sebagai berikut:

Saldo Awal 31 Desember 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2023
-	45,959,594.00	-	45,959,594.00

Penjelasan atas mutasi Aset Tidak Ditemukan adalah sebagai berikut:

a) Saldo awal yang disajikan sebesar USD0.00 merupakan saldo Laporan Keuangan BMN Hulu Migas UAKPA BUN TK Tahun 2022 audited.

b) Mutasi tambah sebesar USD45,959,594.00 merupakan aset eks PT. Chevron Pacific Indonesia yang tidak ditemukan, di mana secara pencatatan telah diserahkan kepada PT. Pertamina Hulu Rokan sebagai KKKS Alih Kelola WK Rokan.

c. Aset Harta Benda Inventaris

1) Aset Perolehan Sampai dengan Tahun 2010 yang Belum Dilakukan Inventarisasi dan Penilaian Posisi Per 31 Desember 2023

Terdapat aset HBI dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) posisi per 31 Desember 2023 sebesar USD4,174,813.85, dengan rincian sebagai berikut: *(Dalam USD)*

Saldo Awal 31 Desember 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2023
3,337,052.00	1,032,123.78	194,361.75	4,174,813.85

Penjelasan atas mutasi Aset HBI perolehan sebelum tahun 2010 yang belum dilakukan IP adalah sebagai berikut:

a) Saldo awal yang disajikan sebesar USD3,337,051.82 merupakan saldo Laporan Keuangan BMN Hulu Migas UAKPA BUN TK Tahun 2022 *audited*.

b) Mutasi tambah sebesar USD1,032,123.78 merupakan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan KKKS dan atau koreksi pembenahan KKKS.

c) Mutasi kurang sebesar USD194,361.75 merupakan aset yang telah dilakukan Inventarisasi dan Penilaian pada tahun 2022 - 2023 dan direklasifikasi ke neraca.

2) Aset Dalam Proses Penghapusan

Terdapat aset yang sudah terjual, namun belum dapat dihapuskan karena belum diperoleh surat hapus bukunya dari SKK Migas atau surat keputusan penghapusan Kementerian ESDM dan terdapat aset dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusan oleh SKK Migas kepada Kementerian ESDM. Pada 31 Desember 2023 nilai aset dalam proses penghapusan adalah sebesar USD27,197.87, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal 31 Desember 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2023
15,127.00	12,071.00	0.00	27,197.87

Penjelasan atas mutasi Aset Dalam Proses Penghapusan adalah sebagai berikut:

a) Saldo awal yang disajikan sebesar USD15,126.56 merupakan saldo Laporan Keuangan BMN Hulu Migas UAKPA BUN TK Tahun 2022 *audited*.

b) Mutasi tambah sebesar USD12,071.00 merupakan merupakan penghapusan BMN Hulu Migas yang telah terbit Surat Hapus Buku dari SKK Migas pada KKKS.

3) Aset Tidak Ditemukan

Pada Tahun 2023, terdapat aset tidak ditemukan sebagai berikut:

Saldo Awal 31 Desember 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2023
-	27,522.00	-	27,522.00

Penjelasan atas mutasi Aset Tidak Ditemukan adalah sebagai berikut:

a. Saldo awal yang disajikan sebesar USD0.00 merupakan saldo Laporan Keuangan BMN Hulu Migas UAKPA BUN TK Tahun 2022 *audited*.
b. Mutasi tambah sebesar USD27,522.00 merupakan aset eks PT. Chevron Pacific Indonesia yang tidak ditemukan, di mana secara pencatatan telah diserahkan kepada PT. Pertamina Hulu Rokan sebagai KKKS Alih Kelola WK Rokan.

5. PENJELASAN ATAS PENGELOLAAN DAN PENGAMANAN BMN BERUPA TANAH DI WILAYAH KERJA ROKAN OLEH KKKS PHR (ALIH KELOLA EKS PT CPI) TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN

PPBMN bersama dengan DJKN, SKK Migas dan KKKS melakukan pengelolaan BMN Tanah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, selain itu dalam rangka pengamanan BMN Tanah khususnya Eks KKKS PT CPI, telah dilakukan pengamanan secara administratif melalui pencatatan dan sertifikasi BMN Tanah Hulu migas yang saat ini terus berlangsung. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim BPK RI, diketahui bahwa masih terdapat BMN Tanah yang bersengketa dengan pihak lain dengan rincian sebagai berikut:

Kasus Non Litigasi

No	Kasus	Tahun	Status Update
1	Area 361 Ha (Murini)	1994	DJKN menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Pemanfaatan BMN untuk periode 2019, Murini sampai sekarang belum merespon, BMN masih dikuasai secara fisik oleh Murini.
2	Ivomas Tunggal	1994	Status terakhir hearing di DPRD Riau pada tahun 2019 terkait laporan kelompok orang yg mengaku sbg masy adat, tidak ada resolusi apapun dlm hearing ini, status quo sampai sekarang.
3	Kelompok Masyarakat Pemilik Tanah (KMPT-Bangko Jaya)	2004	Status terakhir kelompok tsb mengirimkan surat ke Kemen BUMN di 2019, tidak ada perkembangan lebih lanjut.

No	Kasus	Tahun	Status Update
4	Kelompok Sawit Permai (KTSP)	2004	status terakhir mereka kirim surat ke Menteri BUMN dan Dirut Pertamina di tahun 2019, CPI sekali diundang meeting oleh Tim Kawal BMN Kemen BUMN, status penanganan lebih lanjut tidak ada lagi sejak itu.
5	Candi Pemburu Bypass	2001	update terakhir di 2017 ybs melakukan aksi pemblokiran lokasi, CPI melaporkan ke polres rohil, dan belum ada update hingga kini.
6	PT. INTERNATIONAL PRIMA COAL (PT.IPC)	2011	a) Tahap diskusi internal dan mapping bersama antara Cue Kalimantan dan PT.IPC; b) PT.IPC menyampaikan Surat Permohonan Penggunaan Lahan untuk kegiatan penambangan.

Kasus Litigasi

No	Nama/Lokasi	No. Perkara PN/PT/MA	Status Perkara	Keterangan
1	Sarbini – PN Dumai	16/Pdt.G/2019/PN Dum	Putusan PN (Inkrah)	putusan PN Dumai menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Inkrah)
2	Yayasan Menara -PN Dumai	44/Pdt.G/2019/PN Dum 245/PDT/2020/PT PBR	Putusan PN (Inkrah)	Putusan PT Pekanbaru (banding) menguatkan putusan PN Dumai yg menolak gugatan penggugat utk seluruhnya (Inkrah)
3	Buyung Nahar – PN Bengkalis	0/Pdt.G/2020/PN Bls	Proses Kasasi PN dan PT menang	Menunggu Putusan MA atas Kasasi yg diajukan Buyung Nahar. Di tingkat PN dan PT menolak gugatan penggugat utk seluruhnya.
4	Yulizar – PN Bengkalis	31/Pdt.G/2020/PN Bls	Putusan PT (Inkrah) PN menang	Putusan Banding yang menyatakan gugatan penggugat tidak diterima.
5	Mastison Isa – PN Pekanbaru	194/Pdt.G/2019/PN Pbr	Putusan Kasasi (Inkrah)	majelis hakim Kasasi mahkamah agung menguatkan putusan PT dan PN yg menolak gugatan penggugat utk seluruhnya (Inkrah).
		152/PDT/2020/PT PBR	PN, PT dan Kasasi menang	

No	Nama/Lokasi	No. Perkara PN/PT/MA	Status Perkara	Keterangan
6	Syamsuri (Rantau Bais) – PN Rokan Hilir)	10/PDT.PLW/2015/PN RHL 237/PDT/2017/PT PBR	Putusan Kasasi MA (Belum menerima Relaas Pemberitahuan Putusan)	Putusan Kasasi MA menguatkan putusan PT dan PN yang menyatakan gugatan penggugat syamsuri tidak dapat diterima.

Sebagai salah satu bentuk preventif dalam rangka mitigasi dan pemantauan risiko terhadap BMN Tanah yang bersengketa dengan pihak lain, Kementerian ESDM telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang dan SKK Migas selaku Kuasa Pengguna Barang melalui surat :

a. Surat Kepala Pusat Pengelolaan BMN kepada Deputi Dukungan Bisnis, SKK Migas Nomor 669/90/SJA.4/2020, tanggal 14 September 2020, hal Pelaporan Sertipikasi dan Bukti Kepemilikan BMN Hulu Migas Berupa Tanah;
b. Surat Kepala Pusat Pengelolaan BMN kepada Deputi Dukungan Bisnis, SKK Migas Nomor T-135/BN.05/SJA.4/2022, tanggal 22 Februari 2022, hal Penyampaian Bukti Kepemilikan BMN Hulu Migas berupa Tanah;
c. Surat Kepala Pusat Pengelolaan BMN yang ditujukan kepada Direktur PNKNL, Kementerian Keuangan Nomor T-145/BN.10/SJA.4/2022 tanggal 15 Februari 2022, hal Permintaan Pendapat/Masukan Atas Rancangan Roadmap Sertipikasi BMN Hulu Migas Berupa Tanah;
d. Surat Sekretaris Jenderal KESDM kepada Kepala SKK Migas Nomor T-540/BN.05/SJN.A/2021, tanggal 28 April 2021, hal Penyerahan Barang Milik Negara pada WK Rokan.

6. PENGELOLAAN DAN PENGAMANAN BMN BERUPA TANAH PADA KKKS PERTAMINA HULU MAHAKAM TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN

Sesuai ketentuan Pasal 77 ayat 1 PMK 140/PMK.06/2020, bahwa Kontraktor, Kuasa Pengguna Barang, Pengguna barang dan Pengelola Barang wajib melakukan Pengaman BMN Hulu Migas yang menjadi tanggung jawabnya dengan biaya yang dibebankan kepada anggaran masing-masing dan sesuai ketentuan pasal 77 ayat 2, Pengamanan BMN Hulu Migas oleh Kontraktor dilakukan sampai dengan Terjadinya penyerahan atau peralihan kepada Pemerintah atau Pihak Lain dan/atau selesainya pelaksanaan permusnahan yang dibuktikan dengan suatu berita acara. Sehubungan dengan hasil pemeriksaan Tim BPK RI, masih terdapat 3 bidang tanah dalam sengketa dengan pihak lain, yaitu:

a. Sengketa atas BMN Tanah Handil berlokasi di Kelurahan Muara Jawa Ulu seluas 40.800 m2 pekara nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Trg dengan penggugat a.n. Ramli dkk, 5 (orang) dan tergugat adalah PT PHM, PT Total Fina Elf E&P Balikpapan, BPN Kab. Kutai Kartanegara dan Kelurahan Muara Jawa Ulu. Status terakhir atas perkara ini telah diputus sampai dengan tingkat Banding di

bawah perkara No. 79/PDT/2021/PT SMR, dengan amar gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

b. Sengketa atas BMN Tanah Muara Kembang Perkara 45/Pdt.G/2020/PN.Trg, dengan penggugat a.n. M.Nursidiq dkk (4 orang) dan tergugat adalah PT PHM dan SKK Migas, gugatan terkait dengan klaim atas tanah di wilayah Muara Kembang. Status terakhir atas perkara ini gugatan ini telah dicabut oleh Para Penggugat.

7. PENGENDALIAN ATAS PEMANFAATAN ASET BMN HULU MIGAS BELUM MEMADAI

Sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat 35 pemanfaatan BMN Hulu Migas, dengan rincian sebagai berikut:

Kriteria	Jumlah Usulan	Nilai Sewa
Sewa dengan status aktif (Telah dicatat sebagai Pendapatan LO dan di akrualkan)	28	102.779.489.054,00
Sewa mendahului dengan pembayaran uang muka (dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka)	7	1.783.306.700,00
Total	**35**	**104.562.795.754,00**

Pada 28 pemanfaatan BMN yang aktif, terdapat 5 pemanfaatan yang belum ditindaklanjuti dengan perjanjian, yaitu:

No	Nama KKKS	Pihak Penyewa	Nama Aset	Keterangan
1	PT. Petrochina Jabung Limited	PT. Erasakti Wiraforestama	Tanah seluas 200 m² pada KKKS PT. Petrochina Jabung Limited	
2	ExxonMobil Oil Indonesia	PT Pertamina Gas	Tanah ExxonMobil Cepu Limited	Pembayaran sebagian sewa
3	PT Pertamina Hulu Rokan	PT Pertamina Gas		Pembayaran uang muka sewa berdasarkan Persetujuan Pemanfaatan Mendahului Nomor S-181/MK.6/KN.4/2022, Tanggal 23 Desember 2022
4	PT Pertamina Hulu Rokan	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Pekanbaru	Tanah dan HBM	Pelunasan Uang Sewa BMN Hulu Migas KKKS PT PHR berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan Nomor S-542/MK.6/2023, Tanggal 30 Juli 2023
5	PT Pertamina Hulu Rokan	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Dumai	Tanah dan HBM	Pelunasan Uang Sewa BMN Hulu Migas KKKS PT PHR berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan Nomor S-603/MK.6/2023, Tanggal 14 Agustus 2023

8. CATATAN PENTING LAINNYA PENGGANTIAN BIAYA DAN MARGIN IP PEN YANG WAJAR

Penggantian biaya dan margin IP PEN merupakan bagian dari program PC PEN kluster Pembiayaan Korporasi. Realisasi penyaluran penggantian biaya dan margin IP PEN selama Tahun 2023 sebesar Rp5.487.896.908,00, dari alokasi DIPA sebesar Rp9.595.012.000,00 dengan capaian Rincian Output adalah 57,20%. Realisasi tersebut merupakan penyaluran atas penggantian biaya dan margin periode April 2023 kepada PT SMI, PT SMF, dan LPEI sesuai hasil reviu BPKP sebagaimana disampaikan melalui surat nomor PE.12.03/S-843/D1/01/2023 tanggal 23 Oktober 2023.

Adapun atas tagihan periode Oktober 2023 telah disampaikan permohonan reviu kepada BPKP melalui surat nomor S-64/KN/KN.3/2023 tanggal 30 November 2023 namun baru mendapat tanggapan sesuai surat nomor PE.12.03/S-144/D1/01/2024 tanggal 15 Maret 2024 dan direncanakan untuk dibayarkan pada bulan Mei 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, biaya atas tagihan periode Oktober 2023 telah di carry over untuk dialokasikan pada anggaran Tahun 2024.

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian investasi, Pelaksana Investasi dapat menyampaikan tagihan pada periode April dan Oktober. Melalui surat nomor S-53/KN.3/2024 tanggal 14 Maret 2024, Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan menyampaikan konfirmasi atas nilai tagihan biaya dan margin IP PEN bulan November dan Desember 2023. Berdasarkan jawaban Pelaksana Investasi bahwa total nilai tagihan biaya dan margin IP PEN bulan November dan Desember 2023 adalah sebesar Rp1.065.647.306 dicatat sebagai beban diestimasi tahun 2023. Adapun untuk belanja/beban Tahun 2023 yang dibayarkan pada periode April 2023 termasuk di dalamnya adalah tagihan Pelaksana Investasi untuk bulan November dan Desember Tahun 2022 mengingat pada kertas kerja reviu tim BPKP untuk tagihan periode April 2023 sulit untuk dipisahkan antara tagihan November s.d. Desember 2022 dengan tagihan Januari s.d. April 2023.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL BUN

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full acdacrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

Pendapatan Operasional terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak, yang meliputi Pendapatan Sumber Daya Alam, Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN, Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya, Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Penyesuaian. Sedangkan Beban Operasional terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Barang Lainnya, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Transfer, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyusutan Piutang Tak Tertagih dan Beban Lain-lain.

Terdapat defisit pada Laporan Operasional pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.463.681.266.458.881 dan Rp1.718.001.589.034.153. Defisit pada Laporan Operasional pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp254.320.322.575.272 atau sebesar 14,80% bila dibandingkan dengan Tahun 2022.

Defisit LO selama Tahun 2023 sebesar Rp1.463.681.266.458.881 tersebut berasal dari defisit kegiatan operasional dan surplus kegiatan non operasional. Adapun defisit kegiatan operasional pada Tahun 2023 sebesar Rp1.524.731.381.098.632 yang terdiri dari Pendapatan Operasional sebesar Rp565.945.322.925.559 dan Beban Operasional sebesar Rp2.090.676.704.024.191.

Sedangkan dari kegiatan non operasional pada Tahun 2023 terdapat surplus sebesar Rp61.050.114.639.751 yang merupakan rekapitulasi dari defisit penjualan aset non lancar sebesar Rp548.331.294.499, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang sebesar Rp431.442.410.900 dan surplus kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp62.029.888.345.150.

E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

E.2.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp565.945.322.925.559 dan Rp527.599.941.416.642. Pendapatan Operasional pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp38.345.381.508.917 atau naik 7,27% bila dibandingkan dengan Tahun 2022. Pendapatan Operasional terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Pendapatan Hibah seperti tersebut di bawah ini:

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1.	Pendapatan Negara Bukan Pajak	539.048.066.196.555	509.699.262.247.570
2.	Pendapatan Hibah	26.897.256.729.004	17.900.679.169.072
Jumlah		**565.945.322.925.559**	**527.599.941.416.642**

Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp539.048.066.196.555 dan Rp509.699.262.247.570. PNBP pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp29.348.803.948.985 atau naik 5,76% bila dibandingkan dengan tahun 2022 terutama kenaikan pada PNBP Lainnya. Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Tahun 2023 sebesar

Rp539.048.066.196.555 terdiri dari Pendapatan Sumber Daya Alam, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, dan PNBP Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1.	Pendapatan Sumber Daya Alam	145.845.627.194.635	182.453.640.268.794
2.	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	4.529.734	819.575
3.	PNBP Lainnya	393.202.434.472.186	327.245.621.159.201
Jumlah		**539.048.066.196.555**	**509.699.262.247.570**

Pendapatan Hibah pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp26.897.256.729.004 dan Rp17.900.679.169.072. Pendapatan Hibah pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp8.996.577.559.932 atau naik 50,26 % bila dibandingkan dengan Tahun 2022.

E.2.1.1. Pendapatan Sumber Daya Alam

Pendapatan Sumber Daya Alam pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp145.845.627.194.635 dan Rp182.453.640.268.794. Pendapatan SDA pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp36.608.013.074.159 atau turun 20,06% bila dibandingkan dengan Tahun 2022. Pendapatan Sumber Daya Alam yang menurun signifikan adalah Pendapatan Minyak Bumi yang antara lain disebabkan menurunnya realisasi ICP dan lifting migas pada tahun 2023. Menurunnya Pendapatan Minyak Bumi disebabkan oleh realisasi ICP yang mencapai USD76,46 per barel untuk periode Desember 2022 – Mei 2023 atau 84,96 persen dari target ICP APBN TA 2023 dan USD76,41 per barel untuk periode Januari 2023 – Mei 2023 atau hanya mencapai 84,90 persen dari target ICP APBN TA 2023 di mana target ICP yang ditetapkan pada APBN TA 2023 sebesar USD90 per barel.

Pendapatan Sumber Daya Alam terdiri dari PNBP Sektor Migas dan Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah atas Pertambangan Panas Bumi. Pendapatan LO sektor hulu migas diakui pada saat diterimanya tagihan atas piutang migas yang diterbitkan oleh SKK Migas. Sementara itu, Pendapatan LO-Setoran Bagian Pemerintah (SBP) Pertambangan Panas Bumi diakui pada saat selesainya perhitungan hak pemerintah atas Bagian Pendapatan Panas Bumi yaitu pada saat selesainya penyusunan kertas kerja perhitungan PNBP sebagai dasar pemindahbukuan PNBP panas bumi dan/atau pada saat diterbitkannya surat tagihan atas kekurangan pembayaran setoran bagian pemerintah. Adapun Pendapatan Sumber Daya Alam pada Tahun 2023 sebesar Rp145.845.627.194.635 merupakan PNBP dari BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA 999.99) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1.	Pendapatan SDA Minyak dan Gas	142.259.466.286.081	179.565.389.364.224
2.	Pendapatan SDA Panas Bumi	3.586.160.908.554	2.888.250.904.570
Jumlah		**145.845.627.194.635**	**182.453.640.268.794**

A. Pendapatan SDA Minyak dan Gas Bumi

Pendapatan SDA Minyak dan Gas pada Tahun 2023 sebesar Rp142.259.466.286.081 mengalami penurunan sebesar Rp37.305.923.078.143 atau 20,78% bila dibandingkan dengan tahun 2022. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh realisasi ICP hanya mencapai USD76,46 per barel untuk periode Desember 2022 – Mei 2023 atau 84,96 persen dari target ICP APBN TA 2023 dan USD76,41 per barel untuk periode Januari 2023 – Mei 2023 atau hanya mencapai 84,90 persen dari target ICP APBN TA 2023 di mana target ICP yang ditetapkan pada APBN TA 2023 sebesar USD90 per barel. Pendapatan Operasional sektor hulu migas yang selanjutnya disebut dengan Pendapatan LO sektor

hulu migas merupakan hak pemerintah yang secara akrual diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih pemerintah. Pendapatan LO sektor hulu migas diakui pada saat diterimanya tagihan atas hak negara dari kegiatan usaha hulu migas yang diterbitkan oleh SKK Migas dalam periode Januari s.d. Desember 2023. Pendapatan LO yang berasal dari PNBP SDA Migas (Pendapatan Minyak Bumi dan Pendapatan Gas Bumi) dikoreksi apabila terdapat tagihan PBB Migas dari Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dilakukan karena PBB Migas di satu sisi merupakan kewajiban Pemerintah sektor hulu migas yang dibayarkan oleh DJA (sebagai pengurang PNBP SDA Migas), namun di sisi lain merupakan pendapatan pajak yang dilaporkan oleh DJP. Apabila tidak dilakukan koreksi, penyajian total pendapatan negara dalam LKPP akan mengalami distorsi, karena menyajikan angka PBB Migas sebanyak dua kali.

Pendapatan SDA Minyak dan Gas dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1.	Pendapatan Minyak Bumi	105.109.342.931.994	136.951.787.024.759
2.	Pendapatan Gas Bumi	37.150.123.354.087	42.613.602.339.465
Jumlah		**142.259.466.286.081**	**179.565.389.364.224**

Pendapatan Minyak Bumi-LO merupakan nilai *lifting* SDA minyak bumi yang menjadi hak pemerintah, yang secara akrual akan menambah nilai kekayaan bersih pemerintah. Pendapatan Minyak Bumi-LO diakui pada saat ditetapkannya hak negara dari hasil penjualan dan/atau bagi hasil SDA minyak bumi sesuai Kontrak Kerja Sama oleh SKK Migas dalam laporan pengiriman minyak bumi dan/atau surat tagihan. Pendapatan Minyak Bumi-LO akan dikoreksi pada saat adanya pengakuan kewajiban jangka pendek yang berasal dari PBB Migas yang dialokasikan sebagai pengurang Pendapatan Minyak Bumi, sehingga Pendapatan Minyak Bumi-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp101.478.174.872.872, yaitu berasal dari nilai hak negara dari hasil penjualan dan/atau bagi hasil SDA minyak bumi sesuai Kontrak Kerja Sama dikurangi dengan PBB Migas yang dialokasikan sebagai pengurang Pendapatan Minyak Bumi.

Pendapatan Gas Bumi-LO merupakan nilai lifting SDA gas bumi yang menjadi hak pemerintah, yang secara akrual menambah nilai kekayaan bersih pemerintah. Pendapatan Gas Bumi-LO diakui pada saat ditetapkannya hak negara dari hasil penjualan dan/atau bagi hasil SDA gas bumi sesuai Kontrak Kerja Sama oleh SKK Migas dalam laporan pengiriman gas bumi dan/atau surat tagihanPendapatan Gas Bumi-LO akan dikoreksi pada saat adanya pengakuan kewajiban jangka pendek yang berasal dari PBB Migas yang dialokasikan sebagai pengurang Pendapatan Gas Bumi, sehingga Pendapatan Gas Bumi-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp36.829.882.086.100, yaitu berasal dari nilai hak negara dari hasil penjualan dan/atau bagi hasil SDA gas bumi sesuai Kontrak Kerja Sama, dikurangi PBB Migas yang dialokasikan sebagai pengurang Pendapatan Gas Bumi.

B. Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi (Pendapatan PNBP Panas Bumi-LO)

Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi (Pendapatan PNBP Panas Bumi-LO) merupakan hak pemerintah yang secara akrual diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih pemerintah. Sesuai dengan PMK Nomor 238/PMK.02/2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Panas Bumi, Pendapatan PNBP Panas Bumi LO diakui berdasarkan asas bruto yakni diakui:

a. pada saat timbulnya hak atas bagian pemerintah yang harus dibayarkan oleh Pengusaha; dan/atau
b. pada saat diterbitkannya surat tagihan atas kekurangan pembayaran SBP; dan/atau
c. pada saat dibayarkan Setoran Bagian Pemerintah oleh Pengusaha.

Selain itu, sesuai pengaturan PMK di atas, pengeluaran terkait dengan penyelesaian kewajiban pemerintah akan diakui sebagai:

a. beban yaitu pengeluaran terkait penyelesaian reimbursement PPN dan penggantian bonus produksi, atau;
b. pengurang pendapatan laporan operasional yaitu terkait penyelesaian pembayaran PBB panas bumi.

Memperhatikan hal tersebut di atas, dengan demikian perhitungan pendapatan PNBP Panas Bumi-LO Tahun 2023 diperoleh dari SBP yang diterima triwulanan di rekening panas bumi dikurangkan dengan jumlah pembayaran PBB panas bumi, sebagai berikut:

PNBP Panas Bumi-LO = Setoran bagian pemerintah – PBB panas bumi

Pendapatan PNBP Panas Bumi-LO (Pendapatan LO) periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp3.586.160.908.554 meningkat sebesar Rp697.910.003.984, (Rp3.586.160.908.554 - 2.888.250.904.570) atau sebesar 24,16% dibandingkan realisasi Pendapatan LO pada periode yang sama tahun 2022.

Rincian realisasi Pendapatan PNBP Panas Bumi-LO periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Total
a	**Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah triwulanan (1+2+3+4+5+6+7+8+9)**	**4.024.732.947.890**
	1) PT Pertamina Geothermal Energy- Area Kamojang	588.664.118.106
	2) PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong	242.292.715.323
	3) PT Pertamina Geothermal Energy Area Ulubelu	276.600.856.263
	4) PT Pertamina Geothermal Energy Area Lumut Balai	44.613.470.881
	5) Star Energy Geothermal Salak, Ltd	1.024.216.250.559
	6) Star Energy Geothermal Darajat II, Ltd	689.301.831.082
	7) Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd	1.042.747.486.900
	8) PT Geo Dipa Energy area Dieng	6.487.878.365
	9) PT Geo Dipa Energy area Patuha	109.808.340.411
b	**Pengakuan piutang berdasarkan tagihan kurang bayar SBP hasil audit BPKP PT PGE Tahun buku 2019-2020**	**1.416.607.984**
c	**Tagihan PBB panas bumi TA 2023**	**439.988.647.320**
d	**Pendapatan PNBP Panas Bumi-LO (a+b-c)**	**3.586.160.908.554**

E.2.1.2. Pendapatan dari Kekayaaan Negara yang Dipisahkan

Pendapatan Bagian Pemerintah dari Kekayaan Negara Dipisahkan pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.529.734 dan Rp819.575. Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan merupakan pendapatan bagian laba BUMN pada BA BUN Pengelola Investasi Pemerintah (999.03) Pendapatan Bagian Pemerintah dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan sebesar Rp4.529.734 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.710.159 atau 452,69% bila dibandingkan dengan tahun 2022. Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan merupakan pendapatan bagian laba BUMN yang berasal dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN dengan pencatatan metode biaya. Metode Biaya Digunakan untuk penilaian Investasi Pemerintah pada PMN apabila kepemilikan atau saham milik negara sebagai Penyertaan Modal di entitas badan usaha (*investee*) kurang dari 20% dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan atau minoritas. Kenaikan ini terjadi pada bagian laba BUMN Non Perbankan.

Perinciannya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan	10	19
2	Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan	4.529.724	819.556
Jumlah		**4.529.734**	**819.575**

E.2.1.3. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan PNBP Lainnya pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp393.202.434.472.186 dan Rp327.245.621.159.201. PNBP Lainnya pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp65.956.813.312.985 atau naik 20,16%. Kenaikan terjadi pada BA BUN Pengelola Investasi Pemerintah (999.03) yang naik 20,17% atau sebesar Rp52.278.083.803.445 karena adanya penyesuaian nilai investasi pada Kementerian BUMN. Selain itu juga terjadi kenaikan yang signifikan pada BA BUN Pengelola Belanja Lain-lain yang naik 896,34% atau sebesar Rp5.822.166.943 karena terdapat pendapatan iuran dan denda pada Kanwil DJPb Provinsi Papua dikarenakan PT Pos Indonesia melakukan pelanggaran kontrak. Pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp393.202.434.472.186 merupakan pendapatan dari BUN dengan rincian sebagai berikut:

BA	Uraian	TA 2023	TA 2022
999.01	Pengelola Utang	38.392.622.225.365	30.337.952.650.210
999.03	Pengelola Investasi Pemerintah	310.097.990.846.992	259.165.527.768.465
999.04	Pengelola Pemberian Pinjaman	1.657.913.291.824	1.580.095.997.358
999.05	Pengelola Transfer ke Daerah	-	42.467.060.000
999.07	Pengelola Belanja Subsidi	313.054.400	1.747.298.384
999.08	Pengelola Belanja Lain-lain	6.471.713.724	649.546.781
999.99	Pengelola Transaksi Khusus	43.047.123.339.881	36.117.180.838.003
Jumlah		**393.202.434.472.186**	**327.245.621.159.201**

1. Pendapatan PNBP Lainnya pada BA BUN Pengelolaan Utang (BA BUN 999.01) sebesar Rp38.392.622.225.365 mengalami kenaikan sebesar Rp8.054.669.575.155 atau 26,55%. Kenaikan tersebut disebabkan karena meningkatnya Kontribusi Bank Indonesia yang diterima oleh Pemerintah. PNBP Lainnya tersebut merupakan Pendapatan Premium dan Pendapatan Anggaran Lain-Lain. Berikut rincian PNBP Lainnya pada BA BUN Pengelolaan Utang (999.01):

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah	4.581.314.433.822	4.430.386.823.600
2	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing	44.282.432.000	56.513.511.000
3	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Negara Syariah (SBSN)	2.053.131.628.273	2.858.861.134.300
4	Pendapatan Anggaran lain-lain:	31.713.893.731.270	22.992.191.181.310
	- SBN	31.713.893.731.270	22.962.080.583.299
	- Pinjaman	-	30.110.598.011
Jumlah		**38.392.622.225.365**	**30.337.952.650.210**

Pendapatan Premium merupakan amortisasi dari Penerimaan Premium atas Penerbitan SBN sampai dengan Tahun Anggaran 2023. Pendapatan Anggaran lain-lain terdiri dari Pendapatan Anggaran Lain-Lain instrumen SBN dan Pendapatan Anggaran Lain-Lain instrumen Pinjaman. Pendapatan Anggaran Lain-Lain instrumen SBN merupakan pendapatan dari kontribusi BI sebesar Rp31.713.893.601.025 dengan rincian sebagaimana pada Catatan Penting Lainnya Pos LO, pendapatan atas Transaksi Pengujian Evaluasi Tahunan atas Sistem Mitra Distribusi dalam Rangka

Penjualan SUN Ritel 2023 sebesar Rp93.200, dan tansaksi Test *Swift Amount Sukuk Global* sebesar Rp37.045.

2. Pendapatan PNBP Lainnya pada BA BUN Pengelola Investasi (BA BUN 999.03) sebesar Rp310.097.990.846.992 mengalami kenaikan sebesar Rp52.278.083.803.445 atau naik 20,17% dibanding PNBP Lainnya pada Tahun 2022. Kenaikan yang signifikan terjadi pada penyesuaian nilai investasi pada Kementerian BUMN. Rincian Pendapatan PNBP Lainnya pada BA BUN Pengelola Investasi (999.03) adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi	308.607.481.035.758	257.942.187.968.841
2	Pendapatan Bunga Lainnya	1.242.329.424.567	920.677.153.576
3	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur	132.719.012.880	71.085.329.125
4	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (penjaminan UMKM)	115.461.373.787	231.577.046.090
5.	Pendapatan Denda Lainnya	-	270.833
Jumlah		**310.097.990.846.992**	**259.165.527.768.465**

a. Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi

Pendapatan penyesuaian investasi merupakan pendapatan penyesuaian nilai investasi yang berasal dari bagian pemerintah atas pendapatan operasional entitas badan usaha (*investee*) yang menambah nilai investasi pemerintah. Pendapatan Penyesuaian Investasi pada BA BUN 999.03 pada tahun 2023 dan 2022 terdiri dari:

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	KPA Kementerian BUMN (986917)	235.905.029.079.745	203.019.948.099.344
2	KPA KND DJKN (977191)	7.885.124.100.945	6.169.734.758.509
3	KPA DJPPR dit EAS (970974)	11.283.040	12.735.100
4	UAIP (999244)	64.688.635.973.193	48.695.506.414.956
5	Direktorat SMI DJPB (961671)	29.791.828.380	9.145.184.624
6	Dirjen Pembiayaan Kementerian PUPR, modal Awal BP Tapera (987253)	54.529.660.743	45.172.816.493
7	KPA LDKPI (979015)	7.289.148.913	2.667.959.815
8	KPA Badan Bank Tanah (986392)	37.069.960.799	-
Jumlah		**308.607.481.035.758**	**257.942.187.968.841**

KPA Kementerian BUMN (986917)

Pendapatan yang dibukukan BUMN/Badan Usaha di bawah Kementerian BUMN senilai Rp235.905.029.079.745 merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan perusahaan negara di bawah Kementerian BUMN dalam Laporan Keuangan. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar Rp32.885.080.980.401 atau naik 16,20% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022.

Rincian Pendapatan Penyesuaian Investasi pada satuan kerja Kementerian BUMN dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	BUMN Persero	232.133.739.752.565	201.173.013.798.316
2	BUMN Perum	2.420.905.208.955	1.788.297.724.944
3	Non BUMN (minoritas)	-	58.636.576.084
Pendapatan Penyesuaian Investasi Lainnya			
1	PMN Konversi Aset Non Kas	1.350.384.118.224	
Jumlah		**235.905.029.079.745**	**203.019.948.099.344**

Realisasi pendapatan dari bagian laba pemerintah pada perusahaan negara periode Audited 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp32.885.080.980.402 atau meningkat 16,20% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022. Dalam hal ini, Perum mencatatkan peningkatan laba sebesar Rp632.607.484.011 atau mengalami peningkatan sebesar 35,37% yang sebagian besar dikontribusikan oleh Perum Bulog dan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI). Kenaikan laba pada Perum Bulog sehubungan dengan meningkatnya realisasi penjualan beras baik komersial maupun SPHP (Stabilitas Pasokan Harga Pangan) dan adanya penyaluran beras bantuan pangan terkait bencana alam sedangkan kenaikan pada LPPNPI sehubungan dengan meningkatnya penerimaan pendapatan dari jasa pelayanan penerbangan dan pelayanan terminal terutama pada pelayanan penerbangan internasional. Dan pada tahun 2023 tidak terdapat bagian laba pemerintah atas Non BUMN (minoritas) karena perubahan metode pencatatan pada PTPN I.

Sementara Persero mencatatkan kenaikan laba sebesar Rp30.960.725.954.250 atau mengalami peningkatan sebesar 15,39% yang sebagian besar dikontribusikan BUMN pada klaster energi, perbankan, minerba, jasa pariwisata, dan telekomunikasi. Hal ini karena adanya pengakuan laba kurs (tahun 2022 mencatatkan rugi kurs) pada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero), pertumbuhan kredit perbankan Bank BUMN, pengakuan laba pada PT Freeport oleh PT Mineral Industri Indonesia (Persero), peningkatan pendapatan dari segment airport management & airport business pada PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero), peningkatan penjualan data dan jasa TI PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., pengakuan gain atas fair value kombinasi bisnis bertahap pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk, serta keuntungan atas penjualan hak pengusahaan jalan tol pada PT Hutama Karya (Persero).

Adapun pendapatan penyesuaian investasi lainnya sebesar Rp1.350.384.118.224 bersumber dari selisih nilai wajar perolehan atau penambahan Investasi Pemerintah pada PMN secara pertukaran atau konversi aset non kas yaitu pada PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)*/Injourney* sebesar Rp423.282.931.438, Perum PPD sebesar Rp282.414.857.040, dan PT Pertamina (Persero) sebesar Rp644.686.329.746.

KPA KND DJKN (977191)

Pendapatan penyesuaian nilai investasi yang dibukukan BUMN/Badan Usaha di bawah Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) senilai Rp7.885.124.100.945 merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan BUMN/Badan Usaha di bawah Kementerian Keuangan dalam Laporan Keuangan (sebagaimana tersaji dalam lampiran Mutasi Lain-lain BUMN/Badan Usaha/Non BUMN di bawah Kementerian Keuangan) berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2023 yang disampaikan BUMN/ Lembaga/ Perusahaan:

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Persero DJKN	3.586.499.100.944	3.444.105.236.348
2	Badan Usaha Lainnya	4.298.625.000.000	2.725.629.522.161
Jumlah		**7.885.124.100.944**	**6.169.734.758.509**

KPA DJPPR dit EAS (9709740)

Pendapatan penyesuaian nilai investasi yang dibukukan Badan Usaha (Direktorat Jenderal

Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko) senilai Rp11.283.040 merupakan bagi hasil dari deposito mudharabah yang diakui pada tanggal laporan yang diinvestasikan kembali dengan menambahkan pada pokok investasi. Adapun deposito dimaksud merupakan setoran modal Pemerintah yang berasal dari APBN yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan telah ditempatkan pada rekening atas nama Perusahaan Penerbit SBSN II, Perusahaan Penerbit SBSN III, Perusahaan Penerbit SBSN IV, Perusahaan Penerbit SBSN V pada PT Bank Syariah Indonesia Cabang Thamrin, Jakarta. Terjadi penurunan sebesar Rp1.452.060 atau turun 11,40% apabila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2022 yang sebesar Rp12.735.100.

UAIP (999244)

Pendapatan penyesuaian nilai investasi pada UAIP sebesar Rp64.688.635.973.193 dan Rp48.695.506.414.956, terdiri dari kenaikan nilai Investasi permanen lainnya yang bersumber dari kenaikan investasi permanen lainnya. Terjadi kenaikan sebesar Rp15.993.129.558.237 atau 32,84% apabila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2022. Rincian pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi UAIP sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	LPS	25.963.771.556.000	24.867.390.102.000
2	Bank Indonesia	36.309.194.000.000	21.762.810.000.000
3	Institut Pertanian Bogor	116.708.278.383	224.671.061.612
4	Universitas Airlangga	7.373.247.632	18.600.024.657
5	Institut Teknologi Bandung	-	-
6	Universitas Indonesia	193.008.784.676	69.517.294.741
7	Universitas Gadjah Mada	25.445.740.270	271.088.456.888
8	Universitas Pendidikan Indonesia*	94.855.931.098	111.185.106.051
9	Universitas Sumatera Utara	4.678.868.611	100.196.965.601
10	Universitas Padjajaran	62.764.593.449	43.021.641.505
11	Universitas Diponegoro*	422.185.213.764	403.051.326.098
12	Universitas Hassanudin	55.902.163.176	322.097.124.615
13	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	228.323.588.307	186.288.286.427
14	Universitas Sebelas Maret*	27.318.007.846	51.485.410.570
15	Universitas Negeri Malang	73.108.535.103	34.895.570.989
16	Universitas Brawijaya	63.763.622.242	106.651.280.689
17	Universitas Negeri Padang*	77.738.312.302	45.099.258.613
18	Universitas Syiah Kuala*	14.495.090.890	-
19	Universitas Terbuka*	99.597.445.931	-
20	Universitas Andalas*	54.502.989.799	24.368.521.664
21	Universitas Negeri Surabaya	87.464.097.977	-
22	Universitas Negeri Yogyakarta*	79.326.412.280	-
23	Universitas Negeri Semarang*	159.271.010.501	-
24	BPJS Ketenagakerjaan	467.838.482.956	53.088.982.236
Jumlah		**64.688.635.973.193**	**48.695.506.414.956**

** menggunakan nilai LK Tahun 2023*

Direktorat SMI DJPB (961671)

Pendapatan penyesuaian nilai investasi Tahun 2023 pada Direktorat SMI DJPb sebesar Rp29.791.828.380. Pendapatan penyesuaian pada Direktorat SMI merupakan kenaikan nilai wajar investasi LPDP yang sesuai PMK nomor 174 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah termasuk dalam bentuk aset keuangan (ditempatkan pada obligasi korporasi) yang memenuhi karakteristik *available for sale dan held to maturity* diskonto.

Dirjen Pembiayaan Kementerian PUPR, modal Awal BP Tapera (987253)

Pendapatan penyesuaian nilai investasi pada Dirjen Pembiayaan Kementerian PUPR, modal Awal BP Tapera (987253) Tahun 2023 sebesar Rp54.529.660.743. Pendapatan penyesuaian pada modal awal BP Tapera merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan pada Laporan Keuangan BP Tapera Tahun 2023.

Pendapatan penyesuaian nilai investasi pada Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, modal Awal BP Tapera sebesar Rp55.139.537.845 dimana terjadi kenaikan sebesar Rp9.966.721.352 atau naik 22,06% jika dibandingkan pendapatan penyesuaian pada Tahun 2022 yang menyajikan Rp45.172.816.493. Pendapatan penyesuaian pada modal awal BP Tapera merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan pada Laporan Keuangan Modal Awal BP Tapera Tahun 2023.

KPA LDKPI (979015)

Nilai pendapatan penyesuaian nilai investasi KPA LDKPI pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp7.289.148.913 dan Rp2.667.959.815. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022, nilai pendapatan pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp4.621.189.098 atau 173,21%. Pendapatan tersebut berupa pendapatan PNBP lainnya yang merupakan amortisasi atas penempatan dana pada instrumen investasi yang diperoleh dengan nilai diskonto. Pendapatan atas pengelolaan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional dilaporkan sebagai PNBP pada laporan keuangan LDKPI selaku Satker BA 015.

KPA Badan Bank Tanah (986392)

Nilai pendapatan penyesuaian nilai investasi KPA Badan Bank Tanah pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp37.069.960.799. Nilai pendapatan penyesuaian nilai investasi tersebut merupakan bagian pemerintah atas keuntungan/surplus operasional yang dibukukan pada Laporan Keuangan Badan Bank Tanah Tahun 2023 .

b. Pendapatan Bunga Lainnya

Pendapatan Bunga Lainnya sebesar Rp1.242.329.424.567 terdiri dari pendapatan UAIP, Bunga DNS, Pendapatan Kementerian BUMN Bunga IP PEN, Pendapatan DJPK hasil penempatan dana pengelolaan pinjaman PEN Daerah dan Penempatan dana pengelolaan pinjaman PEN daerah di PT Sarana Multi Infrastruktur. Rincian Pendapatan Bunga Lainnya adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	TA 2023	TA 2022
1	Pendapatan KBUMN Bunga IP PEN	229.496.866.888	180.845.651.050
2	Pendapatan DJPK, hasil penempatan dana pengelolaan pinjaman PEN Daerah	495.076.417.149	450.233.532.161
3	KPA Direktorat SMI	517.756.140.530	289.597.970.365
Jumlah		**1.242.329.424.567**	**920.677.153.576**

KPA Kementerian BUMN (986917)

Pendapatan Bunga pada KPA Kementerian BUMN merupakan pendapatan bunga dari Investasi Non Permanen dalam Pemulihan ekonomi Nasional (IP PEN) dengan nilai pendapatan periode Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp229.496.866.888 dan Rp180.845.651.050, meningkat sebesar Rp48.651.215.838 atau 26,9%. Pendapatan bunga periode 2023 terdiri dari:

a. Pendapatan Bunga lainnya dan denda sebesar Rp215.348.182.797;
b. Pendapatan yang masih harus diterima sebesar Rp14.148.684.091.

Adapun rincian pendapatan bunga IP PEN berdasarkan penerima investasi adalah sebagai berikut:

No	Penerima Investasi	Pendapatan Bunga	Pendapatan yang masih harus diterima
1	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	130.578.911.525	-
2	PT Perkebunan Nusantara III	49.019.271.272	10.898.684.091
3	Perum Perumnas	35.750.000.000	3.250.000.000
	Jumlah	**215.348.182.797**	**14.148.684.091**

PPA DJPK

Pendapatan bunga pada PPA DJPK sebesar Rp495.076.417.149 adalah pendapatan bunga pinjaman PEN Daerah maupun pendapatan bunga lainnya yang berasal dari imbalan atas saldo dana pinjaman PEN Daerah di rekening khusus yang dibentuk PT Sarana Multi Infrastruktur untuk menampung dana pinjaman PEN Daerah dan belum di salurkan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur kepada Pemda sesuai dengan perjanjian. Sesuai dengan Pasal 14A ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021, bahwa hasil penempatan dana pengelolaan pinjaman PEN Daerah pada rekening penampungan PT Sarana Multi Infrastruktur setelah dikurangi dengan biaya-biaya penempatan, disetorkan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) pada setiap triwulan. Setoran ke rekening kas negara oleh wajib setor (PT SMI) sebagai PNBP dengan menggunakan akun pendapatan bunga lainnya (425719).

KPA Direktorat SMI

Pendapatan bunga pada KPA Direktorat SMI pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp517.756.140.530 meningkat sebesar Rp228.158.170.165 atau naik 78,78%. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan bunga lainnya yang merupakan pemindahan saldo dana dari RIBUN ke RKUN dan dari RKUN ke RIBUN imbal hasil atas imbal hasil Investasi Pemerintah pada BP Tapera dalam rangka realisasi PNBP Pemerintah.

c. Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur merupakan pendapatan pada UAKPA Direktorat EAS. IJP Infrastruktur sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 3 tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PP nomor 62 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP Yang Berlaku di Kementerian Keuangan, mengatur IJP Infrastruktur sebagai PNBP BA 015 DJPPR, dimana IJP tersebut dibayarkan Badan Usaha Pelaksana Proyek Infrastruktur Skema KPBU yang menerima jaminan bersama dari pemerintah dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia yang tertuang dalam Surat IJP Pemerintah. Selanjutnya, dengan adanya kebijakan Ditjen Anggaran dan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan yang masing-masing disampaikan melalui nota dinas nomor ND-301/AG.7/2020 tanggal 17 Juni 2020 dan ND-800/SJ/2020 tanggal 22 Juni 2020 ditetapkan bahwa klasifikasi PNBP IJP Infrastruktur diubah yang tadinya merupakan PNBP K/L BA 015 menjadi PNBP BUN.

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur pada Tahun 2023 sebesar Rp132.719.012.880 dirinci sebagai berikut:

No	Tanggal Setoran	Unit Penyetor	Jumlah 2023
1	13 Jan 2023	PT Jasa Marga Jalan layang Cikampek	5.168.000.000
2	22 Feb 2023	PT Bhimasena Power Indonesia	62.145.968.053
	28 Agt 2023		61.532.044.827
3	28 Feb 2023	PT Citra Karya Jabar Tol	2.023.000.000
4	05 Des 2023	PT Wijaya Karya Serang Panimbang	1.850.000.000
		Jumlah	**132.719.012.880**

d. Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (penjaminan UMKM)

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (penjaminan UMKM) pada UAKPA Direktorat EAS merupakan Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan *Loss Limit*. Sesuai dengan Pasal 11 ayat 4 sampai dengan 7 PMK nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam pemberian dukungan berupa *loss limit*, PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo dikenakan IJP *loss limit* dan disetor ke kas negara sebagai PNBP.

Pelaksanaan lebih lanjut terkait PNBP *Loss Limit* diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah (dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR)) dengan PT Askrindo (Persero) dan PT Jamkrindo (Persero), dimana telah diatur tarif PNBP IJP Loss Limit ditetapkan sebesar 1% per tahun dari plafon pinjaman yang dijamin oleh PT Askrindo (Persero) dan PT Jamkrindo (Persero) dan PNBP IJP *Loss Limit* diterima Pemerintah maksimal 15 hari kerja setelah Subsidi IJP diterima oleh PT Askrindo (Persero) dan PT Jamkrindo (Persero), selanjutnya terdapat addendum atas Perjanjian Kerjasama tersebut di atas, yang diantaranya terdapat penyesuaian tarif PNBP IJP *Loss Limit* dari sebesar 1% menjadi sebesar 0,8%, dimana penyesuaian tarif PNBP IJP *Loss Limit* tersebut mulai berlaku untuk sertifikat penjaminan yang diterbitkan pada 1 Februari 2021.

Pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 nilai Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan *Loss Limit* masing-masing sebesar Rp115.461.373.787 dan Rp231.577.046.090 dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Penyetor	TA 2023	TA 2022
1	PT Jamkrindo	56.338.399.385	115.199.927.983
2	PT Askrindo	59.122.974.402	116.377.118.107
Jumlah		**115.461.373.787**	**231.577.046.090**

3. Pendapatan PNBP Lainnya pada BA BUN Pengelola Pemberian Pinjaman (BA BUN 999.04) pada Tahun 2023 sebesar Rp1.657.913.291.824 mengalami kenaikan sebesar Rp77.817.294.466 atau naik 4,92% bila dibandingkan dengan Tahun 2022. Kenaikan ini utamanya terjadi pada pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan dan pengelolaan keuangan. Pendapatan PNBP Lainnya pada BA BUN Pengelola Pemberian Pinjaman pada Tahun 2023 sebesar Rp1.657.913.291.824 terdiri dari:

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	1.626.670.021.070	1.477.111.277.663
2	Pendapatan Denda	29.054.469.222	101.910.456.486
3	Pendapatan lain-lain	2.188.801.532	1.074.263.209
Jumlah		**1.657.913.291.824**	**1.580.095.997.358**

Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.657.913.291.824 dan Rp1.580.095.997.358. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan terdiri dari Pendapatan Bunga dari Piutang Pemberian Pinjaman, Pendapatan Bunga dari Pemberian Kredit Pemerintah, Pendapatan Jasa Bank dari Pemberian Pinjaman, dan Pendapatan Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	TA 2023	TA 2022
1.	Pendapatan Bunga dari Piutang Pemberian Pinjaman (425713)	1.559.846.676.613	1.430.982.029.683

No.	Uraian	TA 2023	TA 2022
2.	Pendapatan Jasa Bank dari Pemberian Pinjaman (425762)	12.013.427	12.013.305
3.	Pendapatan Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman (425763)	66.811.331.030	46.117.234.675
Jumlah		**1.626.670.021.070**	**1.477.111.277.663**

Pendapatan Denda Tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp29.054.469.222 dan Rp101.910.456.486. Pendapatan Denda terdiri dari Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman, Pendapatan Denda Penyaluran Kredit Program, dan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh debitur Kredit Pemerintah (KUMK) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	TA 2023	TA 2022
1.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman (425823)	29.054.469.222	101.910.256.486
2.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh debitur Kredit Pemerintah (KUMK) – (425826)	-	200.000
Jumlah		**29.054.469.222**	**101.910.456.486**

Pendapatan Lain-Lain pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing-masing sebesar Rp2.188.801.532 dan Rp1.074.263.209. Pendapatan Lain-Lain terdiri dari Penerimaan Lainnya dari Piutang Pemberian Pinjaman (425981) dan Pendapatan Anggaran Lain-Lain (425999). Pendapatan Anggaran Lain-Lain Tahun 2023 berasal dari:

a. Kapitalisasi *service charge* yang dikenakan oleh *lender* kepada penerima pinjaman sebesar Rp163.005.768;
b. Setoran yang diterima oleh rekening pemerintah lainnya yaitu rekening penampungan pengembalian kredit gudang, lantai jemur, dan kios KUD (GLK-KUD) sebesar Rp120.585.000;
c. Setoran yang diterima dikarenakan adanya Surat Menteri Keuangan nomor S-404/MK.05/2022 tanggal 16 Mei 2022 hal Penyelesaian Aset Negara Eks Proyek Alumina Bintan terkait penyetoran kas sisa eks proyek sebesar Rp1.620.683.658; dan
d. Penerimaan PIR UPP yang tidak teridentifikasi Surat Pengakuan Hutangnya (SPH) sebesar Rp284.527.106.
e. Pendapatan PNBP Lainnya pada BA BUN Pengelola Transfer ke Daerah (BA BUN 999.05) pada Tahun 2023 sebesar Rp0 atau mengalami penurunan 100% dari PNBP Lainnya pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp42.467.060.000.
f. Pendapatan PNBP Lainnya pada BA BUN Pengelola Belanja Subsidi (BA BUN 999.07) sebesar Rp313.054.400 mengalami penurunan sebesar Rp1.434.243.984 atau turun 82,08% bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp1.747.298.384. Pendapatan PNBP Lainnya pada BA BUN Pengelola Belanja Subsidi Tahun 2023 sebesar Rp313.054.400 terdiri dari Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) dan pendapatan denda keterlambatan pada Bank pelaksana yang terlambat menyalurkan SBUM Perumahan pada Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR.

Rincian PNBP lainnya sebesar Rp313.054.400 pada Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	54.667	47.836
2	Pendapatan Denda	312.999.733	1.443.583.835
Jumlah		**313.054.400**	**1.443.631.671**

Pendapatan Denda sebesar Rp312.999.733 berasal dari akun 425811 (pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah) dan koreksi atas setoran jasa giro pada triwulan IV Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL BAYAR	NTPN	NTB/ NTP	NILAI (Rp)	KETERANGAN
425811					
1	7 Maret 2023	657312G4VG4MH7IG	00000314361	3.288	Keterlambatan Penyaluran SBUM TA 2022 Bank BNI sesuai BA No. 06/BA/RKN/XI/SATKER-DJPI/2023 tanggal 2 Januari 2023
2	6 Maret 2023	715A348VV59FB76M	683979937466	3.288	Denda Keterlambatan Penyaluran SBUM TA 2022 pada Bank Mandiri sesuai BA No. 259/BA/RKN/XI/SATKER-DJPI/2023 tanggal 25 November 2023
3	6 Maret 2023	ADCE648VV59FB6RE	862768936836	193.562	Denda Keterlambatan Penyaluran SBUM TA 2022 pada Bank Mandiri sesuai BA No. 40/BA/RKN/I/SATKER-DJPI/2023 tanggal 10 Januari 2023
4	6 Maret 2023	E2E0F61QUQE855VC	291228936347	384	Keterlambatan Penyaluran SBUM 2022 pada Bank Mandiri sesuai 155/BA/RKN/X/SATKER-DJPI/2023 tanggal 14 Oktober 2023
5	7 Maret 2023	6012148VV59FCDS6	000000157910	233.014	Keterlambatan Penyaluran SBUM TA 2022 pada Bank BNI sesuai BA BA No.10/BA/RKN/XI/SATKER-DJPI/2023 tanggal 2 Januari 2023
6	31 Maret 2023	8125261QUQF2J9LI	574776501382	32.466	Denda Keterlambatan Penyaluran SBUM TA.2022 pada Bank Mandiri sesuai BA No.130/BA/RKN/III/SATKER-DJPI/2023 tanggak 29 Maret 2023
7	14 April 2023	3477E8N3EA8MHG1B	000693200309	312.108.953	Denda atas lebih bayar 3.368 atas klaim asuransi pada Bank BTN sesuai BA No.166/BA/RKN/IV/SATKER-DJPI/2023 tanggal 10 April 2023
8	1 Agustus 2023	BC6418N3EAK87AMN	001207700299	18.490	Denda kelebihan bayar SSM pada Bank BTNS sesuai 394/BA/RKN/VII/SATKER-DJPI/2023 tanggal 28 Juli 2023

NO	TANGGAL BAYAR	NTPN	NTB/ NTP	NILAI (Rp)	KETERANGAN
425811					
9	2 Agustus 2023	71A503CIFB3OQLIQ	140251238641	23.736	Denda keterlambatan penyaluran SBUM pada BPD DKI sesuai BA No. 393/BA/RKN/VII/SATKER-DJPI/2023 tanggal 28 Juli 2023
10	23 Agustus 2023	357658N3EAKRGGTJ	000000143566	100.643	Biaya keterlambatan pengembalian pada Bank BNI sesuai BA No. 454/BA/RKN/VIII/SATKER-DJPI/2023 tanggal 21 Agustus 2023
11	21 September 2023	D09D03CIFB9G4F9L	103253276434	18.462	Denda Keterlambatan Penyaluran SBUM pada Bank DKI sesuai BA No. 487/BA/RKN/IX/SATKER-DJPI/2023 tanggal 20 September 2023
12	25 Oktober 2023	8EC3E61QUR3OE7KU	016162500006	7.918	Keterlambatan penyaluran SBUM pada Bank DIY sesuai BA No. 505/BA/RKN/IX/SATKER-DJPI/2023 tanggal 26 September 2023
13	6 Desember 2023	1DE0A6U8ELRHN7M7	016160600060	2.796	Keterlambatan penyaluran SBUM pada Bank DIY sesuai BA No. 654/BA/RKN/XI/SATKER-DJPI/2023 tanggal 29 November 2023
14	31 Desember 2023	85D427QLUGELQHO0	376245611312	252.733	Keterlambatan penyaluran SBUM pada Bank Mandiri sesuai BA No.670/BA/RKN/XI/SATKER-DJPI/2023 tanggal 28 November 2023 dan BA No. 671/BA/RKN/XI/SATKER-DJPI/2023 tanggal 29 November 2023
		JUMLAH		**312.999.733**	

425764 (Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan)					
1	10 Januari 2023	73D4F7QLUFD406DI	000001164016	9.504	Jasa giro Bulan Desember 2022 BPD Sulawesi Tengah
2	18 Januari 2023	6936F7QLUFDCDTET	104743222114	5.259	Jasa giro Bulan Desember 2022 Bank DKI
3	13 Januari 2023	30ED348VV53QPNI8	'230113000001	726	Jasa giro Bulan Desember 2022 Bank Mega Syariah
4	26 Januari 2023	A4CFD6U8EKRBP16C	230126141836	10.548	Jasa giro Bulan Desember 2022 bank sulutgo
5	20 Januari 2023	08AF348VV53STTGP	091115223229	110	Pendapatan jasa lembaga keuangan Bulan Desember 2022 Bank DKI Syariah
6	26 Juli 2023	03D3555DF08EA9IH	144300233690	12.381	Jasa giro Bulan Juni 2023 Bank DKI

425764 (Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan)					
7	14 Juli 2023	629A83CIFB39OTI9	000001194318	8.542	Jasa giro Bulan Juni 2023 BPD Sulawesi Tengah
8	18 Juli 2023	43BAD48VV5LM5U4G	230718000002	391	Jasa giro Bulan Juni 2023 Bank Mega Syariah
9	20 Juli 2023	41D1861QUQQEVUO1	085223230058	1.013	Jasa giro Bulan Juni 2023 BPD DKI Syariah
10	29 November 2023	9D9EF6U8ELP1SCJR	094935230727	12.546	Jasa giro Bulan September 2023 BPD DKI
11	13 Oktober 2023	983FA55DF0GV57U1	000011318699	442	Jasa giro Bulan September 2023 BPD Jawa Tengah Syariah
12	17 Oktober 2023	7FE631JNFM7DH8I3	000001116779	4.512	Jasa giro Bulan September 2023 BPD Sulawesi Tengah
13	16 Oktober 2023	239CC48VV5UIO8OE	231016000002	454	Jasa giro Bulan September 2023 Bank Mega Syariah
14	13 Oktober 2023	432FA0N9VRL148VU	104828295788	2.486	Jasa giro Bulan September 2023 BPD DKI Syariah
15	28 Desember 2023	3DB7555DF0N7494U	112350258189	1.480	Jasa giro Bulan Desember 2023 BPD DKI Syariah
16	27 Desember 2023	0AE0B8N3EB0OO6GP	231227000014	448	Jasa giro Bulan Desember 2023 Mega Syariah
17	21 Desember 2023	8593061QUR9JH67R	231221145559	819	Jasa giro Bulan Desember 2023 BPD Sulutgo
18	27 Desember 2023	C85D16U8ELRVU5TS	000001158448	5.433	Jasa giro Bulan Desember 2023 BPD Sulteng
19	28 Desember 2023	F336F61QUR9JH4HO	094104257816	14.026	Jasa giro Bulan Desember 2023 BPD DKI
		JUMLAH		**91.120**	
30 Sep 2023 : Jurnal pengurangan pendapatan (D) 425764				(2.834)	
30 Sep 2023 : Jurnal pengurangan pendapatan (D) 425764				(57)	
31 Des 2023 : Jurnal pengurangan pendapatan (D) 425764				(33.562)	
	Pendapatan LO Operasional			**313.054.400**	

4. Pendapatan PNBP Lainnya pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain (BA BUN 9999.08) pada Tahun 2023 sebesar Rp6.471.713.724 mengalami kenaikan sebesar Rp5.822.166.943 atau naik 896,34% bila dibandingkan dengan Tahun 2022. Kenaikan signifikan sebesar Rp6.170.994.742 berasal dari Pendapatan iuran dan denda pada Kanwil DJPb Provinsi Papua dikarenakan PT Pos Indonesia melakukan pelanggaran kontrak. Pendapatan PNBP Lainnya pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain yang sebesar Rp6.471.713.724 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Pendapatan Iuran dan Denda	6.471.063.723	300.068.981
2	Pendapatan Lain-lain	650.001	349.477.800
Jumlah		**6.471.713.724**	**649.546.781**

Pendapatan iuran dan denda sebesar Rp6.471.063.723 terdapat pada:

a. Kanwil DJPb Provinsi Papua berupa Pendapatan terhadap Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp6.398.716.692 berasal dari klaim bank garansi dikarenakan

PT Pos Indonesia melakukan pelanggaran kontrak.

b. MPPKP yang berasal dari Pembayaran Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah oleh PT Mediate Indonesia sebesar Rp343.927.

c. BP Batam berupa Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp62.748.575. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah pada Badan Pengusahaan Kawasan Bintan dan Kota Tanjung Pinang, uraian pekerjaan terdiri dari: Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Menuju Industri Pesawat Apung (PT. Vintech Pratama Konsultan) pada BP Tanjungpinang; Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Harapan Baru Desa Toapaya Utara Kec Toapaya Kab Bintan (1 km) Tahap 1 (CV. Visitama Multi Engineering Consultan) pada BP Bintan; Pembangunan PJUT-S Jalan Raya Tanjung Uban-Tanjungpinang (Lintas Barat) Jembatan Busung-Sp. RSUD Tanjunguban Kab Bintan)CV. Pratindo Pratama) pada BP Bintan; Belanja Media Promosi (PT. Media Printer Indonesia) pada BP Karimun.

d. SKK Migas berupa Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp9.254.529, mengalami kenaikan dibanding tahun 2022. Kenaikan ini terjadi karena bertambahnya pengadaan yang mengalami keterlambatan pada tahun 2023. Pendapatan denda pada tahun 2023 terdiri dari: denda penyelesaian *Renewal* dan *Maintenance* Perangkat Jaringan dan Perangkat Sekuriti; Pengadaan Sewa *Personal Computer* (PC) dan Perangkat IT Lainnya untuk Kantor Perwakilan Wilayah Papua dan Maluku; *Training Need Analysis* (*Training Curriculum* dan *Other Development Program*) untuk Bidang Keuangan dan Komersialisasi; dan Konstruksi Renovasi Gedung Kantor Baru SKK Migas Perwakilan Jabanusa.

Pendapatan anggaran lain-lain sebesar Rp650.001 pada satker MPPKP yang merupakan top-up e-channel yaitu Top Up E-Channel pada RPL Dana Program TA 2022 sebesar Rp640.001 dan Top Up E-Channel pada RPL Dana Program TA 2023 sebesar Rp10.000.

5. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya dari BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA 999.99) Tahun 2023 sebesar Rp43.047.123.339.881 mengalami kenaikan sebesar Rp6.929.942.501.878 atau naik 19,19% bila dibandingkan dengan tahun 2022. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya dari BUN Pengelola Transaksi Khusus sebesar Rp43.047.123.339.881 dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	PNBP Pengelolaan Kas Negara	28.631.252.780.719	14.811.384.936.954
2	PNBP Pengelolaan Dana Pensiun, Akes dll	35.476.180.697	22.948.130.970
3	PNBP Satker TK Suspen Penerimaan	14.622.737.040	5.939.837.239
4	PNBP Pengelola KPPN KPH	9.555.480.032	68
5	PNBP Lainnya dari Pengelolaan Aset BLBI	4.911.990.237	2.900.587.248
6	PNBP Lainnya dari Pengelolaan aset Eks Pertamina	207.651.072.327	207.763.518.504
7	PNBP Lainnya Pengelolaan BPLS	-	319.406.786.468
8	PNBP Setoran Lainnya dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan	493.842.411	203.370.109.038
9	PNBP Satker Migas	13.446.398.724.911	19.966.452.518.439
10	PNBP Pengelola Panas Bumi	-	27.818.478
11	PNBP Pengelola BMN PKP2B	492.710.936.768	334.157.940.613
12	PNBP Pengelolaan Aset Lain-Lain	31.202.346.243	67.630.301.084
13	PNBP Lainnya Aset Bekas Milik Asing Tionghoa	2.141.824.690	7.049.891.200
14	PNBP Pengelola BMN Idle	7.500.000	-
15	PNBP Lainnya Pengelolaan BMN KKKS pada SKK Migas	170.307.752.548	168.028.168.614

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
16	PNBP Lainnya Pengelolaan BMN KKKS pada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA)	390.171.258	120.293.086
Jumlah		**43.047.123.339.881**	**36.117.180.838.003**

E.2.1.4. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp26.897.256.729.004 dan Rp17.900.679.169.072. Pendapatan Hibah merupakan pendapatan operasional yang berasal dari Pendapatan-LO BUN Pengelola Hibah (BA 999.02). Pendapatan Hibah pada Tahun 2023 ini mengalami kenaikan sebesar Rp8.996.577.559.932 atau naik 50,26% bila dibanding dengan tahun 2022. Dari nilai realisasi pendapatan hibah sebesar Rp26.897.256.729.004 sebesar 44,19 persen merupakan realisasi pendapatan hibah terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Pada periode tahun 2023, terdapat 904 register hibah pilkada serentak yang telah dilakukan pengesahan pendapatannya yang terdiri atas hibah terkait pelaksanaan pilkada serentak untuk penyelenggaraan pilkada serentak yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebesar Rp11.802.646.584.451 dan untuk pengamanan pilkada yang diterima oleh TNI dan Polri sebesar Rp82.983.447.120.

Pendapatan Hibah pada Tahun 2023 sebesar Rp26.897.256.729.004 terdiri dari Pendapatan Hibah terencana dan langsung dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Pendapatan Hibah Dalam Negeri		
	a. Melalui Kuasa BUN (Terencana)	-	-
	b. Tdk Melalui Kuasa BUN (langsung)	18.681.668.376.346	6.368.840.606.890
	- Hibah Uang	15.361.429.146.772	2.672.694.521.172
	- Hibah Barang	3.274.761.499.466	3.587.433.576.302
	- Hibah Jasa	45.477.730.108	108.712.509.416
	Jumlah	**18.681.668.376.346**	**6.368.840.606.890**
2	Pendapatan Hibah Luar Negeri		
	a. Melalui Kuasa BUN (Terencana)	423.174.970.047	581.693.945.628
	b. Tdk Melalui Kuasa BUN (Langsung)	7.792.413.382.611	10.950.144.616.554
	- Hibah Uang	1.399.554.762.906	2.437.510.591.595
	- Hibah Barang	2.393.230.936.908	4.749.496.033.745
	- Hibah Jasa	3.999.627.682.797	3.763.137.991.214
	Jumlah	**8.215.588.352.658**	**11.531.838.562.182**
Jumlah Pendapatan Hibah		**26.897.256.729.004**	**17.900.679.169.072**

Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri berdasarkan pemberi hibah terdapat pada **Lampiran E.1.** Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri dirinci per Kementerian/Lembaga penerima hibah terdapat pada **Lampiran E2**.

E.2.2. Beban Operasional

Beban Operasional pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.090.676.704.024.191 dan Rp2.109.524.586.743.946. Beban Operasional pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp18.847.882.719.755 atau turun 0,89% bila dibandingkan dengan Tahun 2022. Penurunan yang signifikan terdapat pada beban lain-lain BUN Lainnya Dana Kompensasi dan beban penyisihan piutang tak tertagih pada Pengelola Transaksi Khusus dibandingkan Tahun 2022.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada

penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Operasional pada Tahun 2023 sebesar Rp2.090.676.704.024.191 tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Beban Pegawai	155.015.591.372.012	166.825.221.592.907
2	Beban Persediaan	1.364.078.683	1.451.347.141
3	Beban Jasa	306.963.409.617	287.297.634.163
4	Beban Pemeliharaan	16.984.662	19.052.080
5	Beban Barang Lainnya	1.117.465.790.616	958.794.033.443
6	Beban Bunga	489.648.053.202.050	409.393.545.381.079
7	Beban Subsidi	251.951.604.553.533	253.662.415.148.483
8	Beban Hibah	219.140.718.777	5.803.272.496.643
9	Beban Transfer	881.390.373.057.804	819.069.477.047.347
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	27.767.138.903.095	28.515.372.568.357
11	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(2.426.602.692.679)	14.826.408.996.259
12	Beban Lain-Lain	285.685.594.646.021	410.181.311.446.044
	Jumlah	**2.090.676.704.024.191**	**2.109.524.586.743.946**

E.2.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp155.015.591.372.012 dan Rp166.825.221.592.907. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai merupakan beban pegawai pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (999.99) yang seluruhnya merupakan beban pegawai satker PNBP pengelolaan Dana Pensiun, Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja PPN BI RTGS, Belanja Selisih Harga Beras Bulog. Beban Pegawai pada Tahun 2023 pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus mengalami penurunan sebesar Rp11.809.630.220.895 atau turun 7,08% bila dibandingkan dengan Tahun 2022 salah satunya karena penurunan Tunjangan Hari Tua (*Unfunded Liability*).

Beban Pegawai pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus sebesar Rp155.015.591.372.012 terdiri dari:

1. Belanja Pensiun, Uang Tunggu sebesar Rp135.095.925.177.5 95 dan Kontribusi APBN sebagai pendanaan bersama dalam pembayaran pensiun Eks PNS Kementerian Perhubungan pada PT KAI Rp568.416.754.506;
2. Belanja Tunjangan, Dana Kehormatan Veteran dan Tunjangan PKRI & KNIP sebesar Rp2.223.997.504.300;
3. Belanja Program Jaminan Sosial Pegawai sebesar Rp11.162.280.566.968;
4. Pengakuan Beban Tunjangan Hari Tua (*Unfunded Liability*) sebesar Rp 5.964.971.368.643, terdiri dari UPSL PT Asabri (Persero) tahun 2022 yang dibayarkan di tahun 2023 sebesar Rp2.270.263.772.727 dan UPSL PT Taspen (Persero) tahun 2023 sebesar Rp3.694.707.595.916.

E.2.2.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.364.078.683 dan Rp1.451.347.141. Beban Persediaan pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp87.268.458 atau turun 6,01% bila dibandingkan dengan Tahun 2022. Beban Persediaan merupakan beban untuk

mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai dan beban persediaan untuk dijual/diserahkan ke masyarakat. Beban Persediaan pada Tahun 2023 tersebut terdapat BA BUN Pengelola Belanja Lain-lain (999.08).

Rincian Beban Persediaan Tahun dan 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	**Kementerian Setneg**	**-**	**59.400.000**
	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	59.400.000
2	**BP BATAM**	**243.045.350,00**	**291.005.604**
	Beban Persediaan konsumsi	240.968.750,	278.145.604
	Beban Persediaan pita, cukai, materai dan leges	-	500.000
	Beban Persediaan bahan baku	1.528.600	12.360.000
	Beban Persediaan lainnya	548.000	
3	**Otoritas Jasa Keuangan**	-	**5.192.000**
	Beban Persediaan Konsumsi	**-**	5.192.000
4	**SKK MIGAS**	**1.121.033.333**	**1.095.749.537**
	Beban Persediaan Konsumsi	1.117.090.635	1.066.633.920
	Beban Persediaan lainnya	3.942.698	29.115.617
	Rincian Beban Persediaan:		
1	Beban Persediaan Konsumsi	1.358.059.385	1.349.971.524
2	Beban Persediaan bahan baku	1.528.600	12.360.000
3	Beban Persediaan Lainnya	4.490.698	29.115.617
4	Beban Persediaan pita, cukai, materai dan leges	-	500.000
5	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	59.400.000
	Jumlah	**1.364.078.683**	**1.451.347.141**

E.2.2.3. Beban Jasa

Jumlah Beban Jasa Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp306.963.409.617 dan Rp287.297.634.163. Beban Jasa Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp19.665.775.454 atau naik 6,85% dibandingkan Tahun 2022. Rincian Beban Jasa yang terdapat pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (999.99) terdiri dari:

1. Beban *Fee* Pelayanan Bank/Pos Persepsi (Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran kepada Bank/Pos Persepsi dalam rangka pelaksanaan *Treasury Single Account* (TSA)) sebesar Rp304.877.715.000;
2. Beban Jasa Pelayanan Perbendaharaan (Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran atas layanan jasa yang telah diberikan dalam rangka kegiatan perbendaharaan (pengeluaran dan penerimaan anggaran) yang memakai fasilitas PT Pos dan Giro serta pembayaran PPN BI RTGS/SWIFT, pembayaran jasa SWIFT BO Valas, pembayaran bunga negatif, pembayaran PPN atas transaksi RTGS Bank Operasional, dan pembayaran imbalan jasa (*fee*) Bank Kustodian) sebesar Rp2.085.694.617.

E.2.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp16.984.662 dan Rp19.052.080. Beban Pemeliharaan pada Tahun 2023 mengalami penurunan yakni sebesar Rp2.067.418 atau turun 10,85% bila dibandingkan dengan tahun 2022. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya ke kondisi normal untuk tetap dapat dipergunakan.

Rincian perbandingan Beban Pemeliharaan pada Tahun 2023 dan 2022 berasal dari BA BUN Pengelola Belanja Lain-lain (BA 999.08) yang sebesar Rp16.984.662 dapat dirinci berdasarkan satuan kerja sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	BP Batam	6.612.400	8.677.500
2	SKK Migas	10.372.262	10.374.580
Jumlah		**16.984.662**	**19.052.080**

E.2.2.5. Beban Barang Lainnya

Beban Barang Lainnya pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.117.465.790.616 dan Rp958.794.033.443. Beban Barang Lainnya pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp158.671.757.173 atau naik 16,55% bila dibandingkan dengan Tahun 2022. Beban Barang Lainnya merupakan beban barang lainnya pada BA BUN 999.99 Pengelolaan Transaksi Khusus.

Secara lebih rinci beban barang lainnya pada BA BUN 999.99 terdiri dari:

1. Beban Penggantian Biaya dan Margin yang Wajar IP PEN
   Beban barang lainnya dalam rangka penyaluran penggantian biaya dan margin yang wajar atas pelaksanaan investasi pemerintah PEN selama Tahun 2023 adalah sebesar Rp Rp10.047.885.858, menyebabkan terjadinya defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp10.047.885.858, sehingga defisit LO menjadi sebesar Rp Rp10.047.885.858. Nilai tersebut merupakan realisasi penyaluran penggantian biaya dan margin periode April 2023 sesuai hasil reviu BPKP yang disampaikan melalui surat nomor PE.12.03/S-843/D1/01/2023 tanggal 23 Oktober 2023 dengan nilai sebesar Rp5.487.896.908, nilai tagihan penggantian biaya dan margin yang wajar IP PEN periode Oktober 2023 sesuai hasil reviu BPKP yang disampaikan melalui surat nomor PE.12.03/S-144/D1/01/2024 tanggal 15 Maret 2024 dengan nilai sebesar Rp3.494.341.644,18, dan nilai beban bulan November dan Desember 2023 berdasarkan jawaban Pelaksana Investasi yang akan disampaikan tagihannya pada bulan April 2024 sebesar Rp 1.065.647.305. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

BUMN	Realisasi atas Tagihan Bulan		Estimasi Tagihan Bulan	
	April 2023	Oktober 2023	November 2023	Desember 2023
PT SMI	3.002.026.528	1.961.207.438	43.384.143	43.384.142
PT SMF	585.380.665	351.988.094	38.038.308	38.155.832
LPEI	1.900.489.715	1.181.146.113	41.625.000	861.059.880
Jumlah	**5.487.896.908**	**3.494.341.645**	**123.047.451**	**942.599.854**
Total				**10.047.885.858**

   Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian investasi, Pelaksana Investasi dapat menyampaikan tagihan pada periode April dan Oktober. Melalui surat nomor S-53/KN.3/2024 tanggal 14 Maret 2024, Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan menyampaikan konfirmasi atas nilai tagihan biaya dan margin IP PEN bulan November dan Desember 2023. Berdasarkan jawaban Pelaksana Investasi, bahwa total nilai tagihan biaya dan margin IP PEN bulan November dan Desember 2023 adalah sebesar Rp1.065.647.306 dicatat sebagai beban diestimasi tahun 2023. Adapun untuk belanja/beban Tahun 2023 yang dibayarkan pada periode April 2023 termasuk di dalamnya adalah tagihan Pelaksana Investasi untuk bulan November dan Desember Tahun 2022 mengingat pada kertas kerja reviu tim BPKP untuk tagihan periode April 2023 sulit untuk dipisahkan antara tagihan November s.d. Desember 2022 dengan tagihan Januari s.d. April 2023.

2. Beban Operasional keperluan pembayaran Kontribusi dan *Trust Fund*
   Jumlah Beban Operasional keperluan pembayaran kontribusi dan *trust fund* pada organisasi internasional Tahun 2023 adalah sebesar Rp226.985.375.175.

3. Beban Kontribusi Fasilitas Penyiapan Proyek (PDF)
   Jumlah beban Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp77.736.876.111 dan Rp66.530.725.012. Jumlah beban pada Tahun 2023 mengalami kenaikan karena bertambahnya capaian keluaran yang mempengaruhi jumlah penggantian biaya penugasan fasilitas penyiapan proyek kepada BUMN Pelaksana Penugasan.

4. Beban Kontribusi Dukungan Kelayakan Proyek Kerja Sama
   Jumlah beban Kontribusi Dukungan Kelayakan Proyek Kerja Sama Tahun 2023 sebesar Rp26.851.576.322. Pada tahun 2023, pencairan anggaran dukungan kelayakan diberikan kepada proyek KPBU SPAM Pekanbaru tahap I dan tahap II. Alokasi dukungan kelayakan dimaksud mengikuti nilai pada Surat Dukungan Kelayakan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan.

5. Beban Kompensasi Penugasan Dukungan Loss Limit
   Jumlah beban Kompensasi Penugasan Dukungan Loss Limit Tahun 2023 sebesar Rp1.401.380.000. Realisasi atas Belanja Dukungan Loss Limit pada tahun 2023 tercapai 100%.

6. Beban Barang Lainnya sebesar Rp774.442.697.150 merupakan Beban Biaya Operasional Penyelenggaraan merupakan pengeluaran yang digunakan untuk penugasan pemerintah kepada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) guna penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun, yang terdiri atas:
   a. BOP kepada PT Taspen (Persero) Rp664.776.851.158;
   b. BOP kepada PT ASABRI (Persero) Rp109.665.845.992

E.2.2.6. Beban Bunga

Beban Bunga pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp489.648.053.202.050 dan Rp409.393.545.381.079. Beban Bunga pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp80.254.507.820.971 atau 19,60% bila dibandingkan dengan tahun 2022. Kenaikan beban bunga karena penarikan pinjaman yang lebih tinggi pada Tahun 2023 dan adanya tambahan Beban Biaya/Kewajiban Lainnya terhadap Pinjaman dari *commitment fee* dan dari *mark up*. Beban bunga sebesar Rp489.648.053.202.050 terdiri dari Beban Bunga SBN sebesar Rp448.961.849.807.635 dan Beban Bunga Instrumen Pinjaman sebesar Rp40.686.203.394.415. Perbedaan nilai antara beban bunga di LO dan pembayaran bunga utang di LRA dikarenakan adanya pengakuan dan pencatatan kontribusi BI sebagai pendapatan, pengakuan beban bunga atas utang bunga dan beban diskon untuk SBN Tahun 2023.

Beban Bunga SBN sebesar Rp448.961.849.807.635 terdiri dari Beban Bunga SBN sebesar Rp439.326.233.430.912 dan Beban Diskon yang menambah Beban Bunga sebesar Rp9.635.616.376.723.

Beban Bunga dari BUN Pengelola Utang (999.01) Tahun 2023 sebesar Rp439.326.233.430.912 dapat dirinci sebagai berikut:

a. Beban Bunga Surat Berharga Negara

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah	313.700.619.979.947	270.298.703.420.368

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
2	Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Obligasi Negara	242.515.144.295	190.937.201.909
3	Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas	42.205.592.083.000	40.563.447.448.571
4	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara	43.726.664.053	61.668.253.633
5	Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang	70.675.625.816.608	61.160.484.557.848
6	Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Panjang	307.098.351.120	201.608.457.712
7	Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Valas	12.128.812.944.249	11.999.749.589.291
8	Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Panjang Valas	22.242.447.640	27.846.305.423
	Jumlah	**439.326.233.430.912**	**384.504.445.234.755**

b. Beban Diskon Yang Menambah Beban Bunga

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Beban Pembayaran *Discount* Surat Perbendaharaan Negara	1.607.810.744.000	1.174.277.689.000
2	Pengembalian Beban Pembayaran *Discount* Surat Perbendaharaan Negara	(28.787.225.000)	-
3	Beban Pembayaran *Discount* Obligasi Negara	4.817.686.284.036	4.742.722.587.195
4	Pengembalian Beban Pembayaran *Discount* Obligasi Negara	(75.484.174.900)	-
5	Beban Pembayaran *Discount* Obligasi Negara Valas	495.683.871.193	411.492.631.746
6	Beban Pembayaran *Discount* Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang	2.622.091.708.394	1.645.451.661.903
7	Pengembalian Beban Pembayaran *Discount* Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang	(102.926.757.000)	-
8	Beban Pembayaran *Discount* SPN Syariah	359.341.926.000	207.964.430.000
9	Pengembalian Beban Pembayaran *Discount* SPN Syariah	(59.800.000.000)	-
Jumlah		**9.635.616.376.723**	**8.181.908.999.844**

Nilai beban bunga atas beban diskon termasuk beban diskon atas SBN Jangka Pendek (SPN dan SPNS). Adapun realisasi nilai beban diskon dan pendapatan premium telah menggunakan akun yang telah disediakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

c. Beban Bunga Instrumen Pinjaman

Beban Bunga Instrumen pinjaman Tahun 2023 sebesar Rp40.686.203.394.415 mengalami kenaikan sebesar Rp23.979.012.247.935 atau naik 143,53% dari Tahun 2022 sebesar Rp16.707.191.146.480. Hal tersebut terjadi karena penarikan pinjaman yang lebih tinggi pada Tahun 2023 dan adanya tambahan Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman dari *commitment fee* dan dari *Mark Up*. Rincian beban bunga instrumen pinjaman adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri	1.620.007.929.172	568.866.466.256
2	Beban Bunga Pinjaman Program	21.334.657.919.454	7.817.228.859.548

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
3	Beban Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program	169.342.160.634	227.975.739.623
4	Beban Bunga Pinjaman Proyek	13.664.992.845.659	6.138.570.178.738
5	Beban Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek	3.896.869.661.421	1.954.264.493.850
6	Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri	332.878.075	285.408.465
	Jumlah	**40.686.203.394.415**	**16.707.191.146.480**

Terdapat tambahan Beban Biaya/Kewajiban Lainnya sebesar Rp152.752.168.324 pada Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman Program dan Pinjaman proyek yang berasal dari *commitment fee* dan dari *mark up* pada Tahun 2023 seperti pada tabel berikut:

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	**Beban Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program**	**9.889.419.726**	**9.810.121.334**
	Beban Biaya/kewajiban lainnya dari *Commitment Fee*	9.889.419.726	9.810.121.334
2	**Beban Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek**	**142.862.748.598**	**150.302.343.370**
	Beban Biaya/kewajiban lainnya dari *Commitment Fee*	50.506.783.151	46.659.982.582
	Beban Biaya/kewajiban lainnya dari *Mark Up*	92.355.965.447	103.642.360.788

E.2.2.7. Beban Subsidi

Beban Subsidi Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp251.951.604.553.533 dan Rp253.662.415.148.483. Beban subsidi merupakan beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.710.810.594.950 atau turun 0,67% bila dibandingkan dengan Tahun 2022.

Pada Beban Subsidi Tahun 2023 sebesar Rp251.951.604.553.533 terdapat Beban Subsidi Estimasi sebesar Rp990.701.314.440. Beban Subsidi Estimasi tersebut terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp602.674.452.543, dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp388.026.861.897.

Beban Subsidi berasal pada BUN Pengelola Belanja Subsidi (BA 999.07) sebesar Rp251.951.604.553.533 dirinci jenis subsidi sebagai berikut:

Jenis Subsidi/PSO	TA 2023	TA 2022
Minyak Solar	17.561.498.024.249	8.794.981.039.646
Minyak Tanah	4.560.105.170.437	5.266.109.914.526
Elpiji	73.719.718.440.748	89.984.283.902.254
Listrik	68.636.731.031.486	58.831.960.181.037
Pupuk	35.533.530.690.953	40.109.471.670.438
PPh-DTP	9.424.842.422.407	7.436.169.902.935
PPN-DTP	505.554.567.558	-
PT KAI	3.271.612.480.022	3.221.224.017.339
PT PELNI	2.661.813.756.015	2.217.997.267.098
PSO Lainnya	172.000.950.000	168.293.494.000
Bantuan Uang Muka Perumahan	933.112.000.000	919.140.000.000
Bunga KPR	4.020.613.823.221	2.563.079.496.205

Jenis Subsidi/PSO	TA 2023	TA 2022
Bunga Kredit Program Lainnya	29.492.388.610.110	1.237.435.466
Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjaminan KUR	2.015.271.068	-
Kredit Resi Gudang	2.142.819.505	12.388.510
Beban Subsidi – Estimasi	1.322.719.648	88.778.032.672
Bunga KUR - Penanganan Pandemi Covid-19	-	29.827.547.271.599
PPH-DTP-Penanganan	-	77.997.660.000
Bunga/ Margin Program PEN	160.295.082.887	155.176.756.597
Imbal Jasa Penjaminan Program	1.292.306.693.219	2.233.941.029.296
PPN-DTP-Penanganan	-	829.701.070.587
PPnBM DTP	-	935.312.618.278
Jumlah	**251.951.604.553.533**	**253.662.415.148.483**

Beban Subsidi berasal pada BUN Pengelola Belanja Subsidi (BA BUN 999.07) sebesar Rp251.951.604.553.533 dirinci menurut Kementerian Negara/Lembaga adalah sebagai berikut:

No	Kementerian Negara/Lembaga	TA 2023	TA 2022
1	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	4.955.589.381.022	3.483.891.399.284
2	Koperasi dan UKM	29.492.999.274.609	29.827.547.271.599
3	Perhubungan	5.933.426.236.037	5.439.221.284.437
4	Perdagangan	2.142.819.505	12.388.510
5	Komunikasi dan Informatika	172.000.950.000	168.293.494.000
6	Pertanian	35.533.530.690.953	40.109.471.670.438
7	Keuangan	175.861.915.201.408	174.633.977.640.215
	Jumlah	**251.951.604.553.533**	**253.662.415.148.483**

Beban Subsidi per Kementerian/Lembaga sampai dengan Tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Beban Subsidi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp4.955.589.381.022. Beban Subsidi dimaksud terdiri dari:

Uraian Jenis Beban	TA 2023	TA 2022
Beban Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	540.838.153	1.237.435.466
Beban Subsidi – Estimasi Ditjen Cipta Karya	1.322.719.648	434.467.613
Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	933.112.000.000	919.140.000.000
Beban Subsidi Bunga KPR	4.020.613.823.221	2.563.079.496.205
Jumlah	**4.955.589.381.022**	**3.483.891.399.284**

2. Kementerian Koperasi dan UKM

Jumlah Beban Subsidi Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp29.492.999.274.609 dan Rp29.827.547.271.599. Beban Subsidi pada satker Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp29.492.999.274.609 yang bersumber dari :

a. Belanja subsidi Bunga Kredit Program Lainnya sebesar Rp 29.490.984.003.541; dan
b. Subsidi Imbalan Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat tahun 2023 sebesar Rp2.015.271.068

3. Kementerian Perhubungan

Jumlah Beban Subsidi Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.933.426.236.037 dan Rp5.439.221.284.437. Beban subsidi diakui pada saat resume tagihan telah diverifikasi dan divalidasi oleh KPA BUN dan/atau timbulnya kewajiban berdasarkan hasil perhitungan dan rekonsiliasi dengan unit teknis, dan verifikasi oleh KPA BUN. Rincian beban subsidi adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022
PSO Perkeretaapian	3.271.612.480.022	3.221.224.017.339
PSO Perhubungan Laut	2.661.813.756.015	2.217.997.267.098
Jumlah	**5.933.426.236.037**	**5.439.221.284.437**

4. Kementerian Perdagangan

Jumlah Beban Subsidi Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.142.819.505 dan Rp12.388.510. Beban subsidi pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.130.430.995. Beban subsidi yang tercatat merupakan tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Skema Subsidi Resi Gudang dari Bank Penyalur SSRG yang telah dibayarkan serta tagihan yang telah dilakukan verifikasi sesuai dengan Berita Acara Verifikasi namun belum dapat dibayarkan karena melebihi alokasi DIPA SSRG TA 2022. Beban Subsidi Bunga/Margin SSRG sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.142.819.505 dengan rincian sebagai berikut:

Bank Penyalur	Jumlah
PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk	1.503.873.880
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	196.295.265
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	350.372.580
PT BPD Jawa Tengah	38.805.560
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	53.472.220
Total	**2.142.819.505**

5. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Jumlah Beban Operasional Tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp172.000.950.000 dan Rp168.293.494.000. Beban Operasional pada Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) Kementerian Komunikasi dan Informatika berupa Beban Subsidi yang digunakan untuk pengelolaan Subsidi PSO untuk Informasi Publik Bidang Pers. Beban Subsidi yang tercatat merupakan tagihan PSO LKBN ANTARA yang telah dibayarkan serta tagihan yang telah dilakukan verifikasi sesuai dengan Berita Acara Verifikasi untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023. Rincian per produk atas Beban Subsidi PSO LKBN ANTARA untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut::

Produk	Total Produk	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
Teks *Hardnews*	145.550	767.000	111.636.850.000
Teks Artikel	1.401	1.058.000	1.482.258.000
Foto	17.516	937.000	16.412.492.000
TV *Features*	40	603.102.000	24.124.080.000
TV *Hardnews*	7.500	1.587.000	11.902.500.000
Infografis	150	19.883.000	2.982.450.000
Photo Story	45	43.114.000	1.940.130.000
Podcast	15	101.346.000	1.520.190.000
Jumlah			**172.000.950.000**

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Produk Berita Teks *Hardnews* sebanyak 145.550 produk dengan nilai sebesar Rp111.636.850.000 berupa berita langsung atau berita lempang yang memuat fakta atau pemyataan aktual hingga perkembangan terkini atas isu tertentu yang memenuhi kaidah jurnalistik dan mengandung unsur pendidikan, pencerahan, pemberdayaan, dalam kerangka wawasan kebangsaan (*educating, enlightening empowering, nasionalism*/3E+ IN).

b. Produk Berita Teks Artikel sebanyak 1.401 produk dengan nilai sebesar Rp1.482.258.000 berupa berita tertulis dalam bentuk tulisan faktual yang memuat analisis, penggambaran latar belakang dan argumentasi/opini penulis dan tulisan kreatif hasil reportase atas isu aktual atau bersifat *human interest* liputan mendalam, profil, dan *news feature*.

c. Produk Berita Foto sebanyak 17.516 produk dengan nilai sebesar Rp16.412.492.000 berupa berita gambar/visual yang memuat fakta aktual, disertai keterangan tertulis atas gambar dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan memuat salah satu atau keseluruhan wawasan kebangsaan (*educating, enlightening empowering, nasionalism*/3E+ IN).

d. Produk Berita TV berupa program audio visual yang digunakan untuk kepentingan yang lebih luas yaitu mendistribusikan program dan kegiatan baik dari Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif serta permintaan dan kebutuhan stasiun TV dan mitra dalam bentuk:

   1) Produk Berita TV *Features* sebanyak 40 produk dengan nilai sebesar Rp24.124.080.000 berupa tayangan dalam bentuk audio visual yang memuat fakta dan memiliki daya tarik insani (*human interest*), tak terikat waktu (*timeless*), dilengkapi dengan *motion grafis*, dan/atau animasi dengan durasi paling kurang 24 menit terbagi dalam 3 (tiga) segmen dengan memuat 5W+1H, dan memuat salah satu atau keseluruhan wawasan kebangsaan (*educating, enlightening empowering, nasionalism*/3E+ IN).
   2) Produk Berita TV Hardnews sebanyak 7.500 produk dengan nilai sebesar Rp11.902.500.000 berupa berita lempang atau berita ringan dalam bentuk *audio visual* yang memuat fakta atau pernyataan aktual mengenai peristiwa terkini dengan durasi minimal 1 (satu) menit dan memuat 5W+1H, memuat salah satu atau keseluruhan wawasan kebangsaan (*educating, enlightening empowering, nasionalism*/3E+ IN).

e. Produk Infografis sebanyak 150 produk dengan nilai sebesar Rp2.982.450.000 berupa produk berita yang menampilkan visualisasi data,fakta, pengetahuan, atau penjelasan atas isu tertentu sehingga mudah dipahami oleh pembaca dengan memuat salah satu atau keseluruhan wawasan kebangsaan (*educating, enlightening empowering, nasionalism*/ 3E+IN).

f. Produk *Photo Story* sebanyak 45 produk dengan nilai sebesar Rp1.940.130.000 berupa rangkaian gambar/visual berisi cerita atas fakta yang tak terikat waktu (*timeless*), disertai narasi/tulisan yang menceritakan rangkaian isi foto yang mengandung *human interest* dengan memuat salah satu atau keseluruhan wawasan kebangsaan (*educating, enlightening empowering, nasionalism*/ 3E+IN).

g. Produk *Podcast* 15 produk dengan nilai sebesar Rp1.520.190.000 berupa tayangan khas *audio visual* berupa perbincangan topik aktual maupun ringan dengan narasumber kompeten dipandu oleh presenter/host durasi sekurang-kurangnya 24 menit dengan spesifikasi memuat 5W+1H, mengandung isu prioritas/strategi, memuat salah satu atau keseluruhan wawasan kebangsaan (*educating, enlightening empowering, nasionalism* / 3E+IN).

6. Kementerian Pertanian

Jumlah Beban Subsidi Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp35.533.530.690.953 dan Rp40.109.471.670.438. Beban Subsidi merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang yang dibayarkan kepada Produsen Pupuk untuk disalurkan kepada Petani. Beban subsidi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp4.575.940.979.485 atau turun 11,41% dari Tahun 2022.

7. Kementerian Keuangan

Beban Subsidi Kementerian Keuangan sampai dengan Tahun 2023 adalah sebesar Rp175.861.915.201.407 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN KELOMPOK BEBAN	TA 2023	TA 2022
Beban Subsidi Untuk Energi	164.478.052.666.920	162.877.335.037.463
Beban Subsidi Untuk Pajak DTP	9.930.396.989.965	9.279.181.251.800
Beban Subsidi Untuk Kredit Program	863.768.416	-
Beban Subsidi Untuk Imbal Jasa Penjaminan dan subsidi estimasi	1.292.306.693.219	2.322.284.594.355
Beban Subsidi Margin Program PEN - Penanganan Pandemi COVID-19	160.295.082.887	155.176.756.597
Jumlah	**175.861.915.201.407**	**174.633.977.640.215**

Beban Subsidi Kementerian Keuangan sampai Tahun 2023 dapat diuraikan per Satker sebagai berikut:

No	Eselon I Kemenkeu	TA 2023	TA 2022
1	DJA	164.478.052.666.920	162.877.335.037.463
2	DJP	9.930.396.989.965	9.279.181.251.800
3	DJPb	863.768.416	2.322.284.594.355
4	DJPPR	1.292.306.693.219	-
5	DJPK	160.295.082.887	155.176.756.597
	Jumlah	**175.861.915.201.407**	**174.633.977.640.215**

1. Direktorat Jenderal Anggaran

Jumlah Beban Subsidi Energi yang ditagihkan DJA Tahun 2023 adalah sebesar Rp164.478.052.666.920. Jumlah Beban Subsidi dimaksud merupakan Beban Subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg atas tagihan Tahun Anggaran 2023 yang telah diverifikasi sebesar Rp 95.841.321.635.435 serta beban Subsidi Listrik periode Tahun 2023 yang telah diverifikasi yang terdiri atas tagihan subsidi listrik bulan Januari s.d. Desember 2023 sebesar Rp69.851.481.660.646.

Beban Subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg atas tagihan Tahun Anggaran 2022 yang telah diverifikasi, terdiri atas:	**95.841.321.635.435**
▪ Penyaluran Subsidi Minyak Solar 2023 kepada PT Pertamina Patra Niaga	15.474.002.051.983
▪ Penyaluran Subsidi Minyak Solar 2023 kepada PT AKR Corporindo, Tbk	131.565.170.017
▪ Penyaluran Subsidi Minyak Tanah 2023 kepada PT Pertamina Patra Niaga (termasuk PPN)	4.082.082.564.330
▪ Penyaluran Subsidi LPG Tabung 3 Kg 2023 kepada PT Pertamina Patra Niaga (termasuk PPN)	69.661.907.147.000
▪ Kurang bayar Subsidi Minyak Solar 2023 kepada PT Pertamina Patra Niaga berdasarkan hasil audit BPK RI	1.940.175.173.857

▪ Kurang bayar Subsidi Minyak Solar 2023 kepada PT AKR Corporindo Tbk. berdasarkan hasil audit BPK RI	15.755.628.392
▪ Kurang bayar Subsidi Minyak Tanah 2023 kepada PT Pertamina Patra Niaga (termasuk PPN) berdasarkan hasil audit BPK RI	478.022.606.108
▪ Kurang Bayar Subsidi LPG Tabung 3 Kg 2023 kepada PT Pertamina Patra Niaga berdasarkan hasil audit BPK RI	4.057.811.293.748
Beban subsidi Listrik Tahun 2023 yang telah diverifikasi	**68.636.731.031.486**
TOTAL	**164.478.052.666.920**

2. Direktorat Jenderal Pajak

Jumlah Beban Subsidi Pajak DTP di DJP Tahun 2023 sebesar Rp9.930.396.989.965. Beban subsidi ini terdiri atas beban subsidi pada P-DTP reguler sebesar Rp9.424.842.422.407 dan beban subsidi terkait PPN DTP KBLBB di tahun 2023 sebesar Rp505.554.567.558.

3. Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Beban Subsidi Kredit Program di Ditjen Perbendaharaan Tahun 2023 sebesar Rp863.768.416. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, Beban Subsidi Tahun 2022 sebesar Rp0, terjadi Kenaikan signifikan beban subsidi sebesar Rp863.768.416 atau 100% disebabkan oleh antara lain:

a) Pada TA 2022 tidak terdapat penyaluran subsidi bunga kredit program.

b) Tagihan yang diajukan bank-bank penyalur telah diterbitkan Berita Acara Verifikasi (BAV) proses penerbitan SPP/SPM/SP2D telah selesai diterbitkan.

c) Nilai BAV periode penagihan subsidi yang ditagihkan oleh bank penyalur merupakan tagihan periode TAYL sehingga nilai tersebut tidak tercatat di LO namun pada koreksi di LPE.

4. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Beban Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) di DJPPR Tahun 2023 sebesar Rp1.292.306.693.219 yang merupakan Beban Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19 periode Januari s.d. Desember 2023.

5. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Beban Subsidi Bunga Pinjaman Daerah di Ditjen Tahun 2023 sebesar Rp160.295.082.887 dan telah memperhitungkan koreksi kurang atas penyajian beban TA 2023 yang merupakan selisih penagihan subsidi bunga pinjaman daerah (DJPK) antara proyeksi dengan realisasi TW-4 TA 2022 sebesar Rp25.887.965. Subsidi bunga pinjaman daerah merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk masa periode Tahun 2023.

E.2.2.8. Beban Hibah

Beban Hibah pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp219.140.718.777 dan Rp5.803.272.496.643. Beban Hibah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp5.584.131.777.866 atau turun 96,22% bila dibandingkan dengan Tahun 2022. Penurunan tersebut terjadi pada Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah yang pada tahun 2023 pencatatannya dialihkan menjadi bagian dari transfer ke daerah yang dikelola oleh BA BUN 999.05 Pengelola Transfer ke Daerah sesuai dengan UU No 1

Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Beban Hibah sebesar Rp219.140.718.777 tersebut berasal dari BUN Pengelola Hibah (BA 999.02) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	69.824.315.937	33.829.048.077
2	Beban Hibah Kepada Organisasi Internasional	149.215.239.063	13.676.743.266
3	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah	-	5.755.516.300.341
4	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya terkait Pendapatan/Belanja Hibah	101.163.777	250.404.959
Jumlah		**219.140.718.777**	**5.803.272.496.643**

Beban hibah sebesar Rp219.140.718.777 merupakan pemberian hibah kepada pemerintah/lembaga asing yang dikelola oleh LDKPI (Satker 985252) yang terdiri atas realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri sebesar Rp69.824.315.937 dan Belanja Hibah kepada Organisasi Internasional sebesar Rp149.215.239.063.

Sementara itu, Beban Operasional pada tahun 2023 sebesar Rp101.163.777 merupakan beban terkait pembayaran biaya/kewajiban lainnya terkait pendapatan/belanja hibah (*banking commission*) kepada MUFG Bank Tokyo.

E.2.2.9. Beban Transfer

Beban Transfer pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp881.390.373.057.804 dan Rp819.069.477.047.347. Beban Transfer pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp62.320.896.010.457 atau naik 7,61% bila dibandingkan dengan Tahun 2022. Kenaikan tersebut antara lain terjadi pada Beban Transfer Dana Perimbangan. Beban Transfer berasal dari BUN Pengelola Transfer ke Daerah (BA 999.05) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Dana Transfer Umum	606.381.015.067.547	552.605.073.491.304
2	Dana Transfer Khusus	178.617.350.796.551	169.855.603.012.388
3	Dana Desa, Insentif Fiskal, Otsus dan Keistimewaan	96.392.007.193.706	96.608.800.543.655
TOTAL		**881.390.373.057.804**	**819.069.477.047.347**

Rincian beban Transfer ke Daerah adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022
Dana Transfer Umum	**606.381.015.067.547**	**552.605.073.491.304**
- Dana Bagi Hasil	208.351.386.473.005	174.605.073.491.304
- Dana Alokasi Umum	398.029.628.594.542	378.000.000.000.000
Dana Transfer Khusus	**178.617.350.796.551**	**169.855.603.012.388**
- Dana Alokasi Khusus Fisik	50.334.741.347.305	54.783.954.054.112
- Dana Alokasi Khusus Nonfisik	125.341.735.389.619	115.071.648.958.276
- Hibah Ke Daerah	2.940.874.059.627	-
Dana Desa, Insentif Fiskal, Otsus, dan Keistimewaan	**96.392.007.193.706**	**96.608.800.543.655**
- Dana Desa	69.895.828.548.550	67.906.138.390.431
- Insentif Fiskal	7.906.031.813.500	6.993.672.774.000

Uraian	TA 2023	TA 2022
- Otonomi Khusus	17.241.263.570.000	20.436.263.570.000
- Dana Keistimewaan	Rp1.348.883.261.656	1.272.725.809.224
TOTAL	**881.390.373.057.804**	**819.069.477.047.347**

Penjelasan Dana Transfer Umum

a. Beban Dana Bagi Hasil (DBH)

Beban Transfer DBH merupakan kewajiban yang terutang dan telah terbayar sampai dengan 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp208.351.386.473.005. Jika dibandingkan Beban DBH Tahun 2022, secara nominal nilai Beban Transfer Dana Bagi Hasil Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp33.746.312.981.701 atau sebesar 19,33%. Beban Transfer DBH secara terinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Beban Transfer DBH Reguler	208.351.386.473.005.	130.514.110.278.434
2	Pengakuan Beban atas Potensi KB dan LB DBH di tahun berjalan	-	44.090.963.212.870
Jumlah		**208.351.386.473.005.**	**174.605.073.491.304**

Beban Transfer DBH Reguler untuk masa periode Tahun 2023, yaitu sebesar Rp208.351.386.473.005. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp77.837.276.194.572 atau sebesar 59,64% dibandingkan Beban Transfer DBH Tahun 2022 yang mencapai Rp130.514.110.278.434. Naiknya Beban Transfer DBH Reguler disebabkan Pagu alokasi regular DBH TA 2023 lebih besar dibandingkan pagu alokasi DBH TA 2023 serta adanya beban transfer DBH Lainnya dari DBH Perkebunan Sawit. Rincian beban transfer DBH Reguler sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Beban Transfer DBH Pajak Reguler	80.504.767.047.084	57.503.908.675.315
2	Beban Transfer DBH SDA Reguler	126.309.872.140.887	73.010.201.603.119
3	Beban Transfer DBH Lainnya	1.536.747.285.034	-
Jumlah		**208.351.386.473.005**	**130.514.110.278.434**

Beban DBH Pajak Reguler untuk periode Tahun 2023 sebesar Rp80.504.767.047.084. Nilai tersebut berasal dari kewajiban yang telah terbayar untuk masa periode sampai dengan 31 Desember TA 2023. Jika dibandingkan Beban Transfer DBH Pajak 31 Desember TA 2023, nilai Beban Transfer DBH Pajak per 31 Desember TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 23.000.858.371.769 atau sebesar 40,00%. Beban Transfer DBH Pajak secara terinci tercantum pada tabel dibawah ini:

Uraian	TA 2023	TA 2022
Beban DBH PPh Pasal 21	40.068.884.113.422	30.203.313.996.061
Beban DBH PPh Pasal 25/29 OP	2.935.803.739.331	2.394.650.180.874
Beban DBH PBB Bagian Daerah	31.206.601.861.089	17.534.838.268.819
Beban DBH PBB Biaya Pemungutan	-	612.680.562.002
Beban DBH PBB Bagi Rata	-	2.360.543.625.694
Beban DBH Cukai Hasil Tembakau	6.293.477.333.242	4.397.882.041.865
Jumlah	**80.504.767.047.084**	**57.503.908.675.315**

Beban transfer DBH SDA Reguler Tahun 2023 sebesar Rp126.309.872.140.887. Jika dibandingkan Beban Transfer DBH SDA Tahun 2022, nilai Beban Transfer DBH SDA Tahun 2023 mengalami

kenaikan sebesar Rp53.299.670.537.768 atau sebesar 73,00%. Naiknya Beban Transfer DBH SDA Reguler disebabkan Pagu alokasi DBH SDA TA 2023 lebih besar dibandingkan pagu alokasi DBH TA 2023. Beban Transfer DBH SDA secara terinci tercantum pada tabel dibawah ini:

Uraian	TA 2023	TA 2022
Beban DBH SDA Minyak Bumi	12.541.960.314.124	9.560.114.554.226
Beban DBH SDA Minyak Bumi Otsus	561.931.814.000	273.421.429.616
Beban DBH SDA Gas Bumi	6.972.776.751.298	5.952.856.701.647
Beban DBH SDA Gas Bumi Otsus	1.975.050.200.000	1.303.879.777.471
Beban DBH SDA Minerba - Iuran Tetap	647.415.455.790	1.016.893.926.799
Beban DBH SDA Minerba - Royalti	99.371.885.899.550	50.698.832.619.864
Beban DBH SDA Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah	2.155.470.977.614	1.228.658.020.763
Beban DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap	29.954.252.617	26.306.182.060
Beban DBH SDA Panas Bumi - Iuran Produksi	79.524.028.865	73.077.784.448
Beban DBH SDA Kehutanan - IIUPH	23.229.897.140	53.396.573.584
Beban DBH SDA Kehutanan - PSDH	802.185.916.944	993.114.594.119
Beban DBH SDA Kehutanan - Dana Reboisasi	638.971.950.330	725.086.773.478
Beban DBH SDA Perikanan	509.514.682.615	1.104.562.665.044
Jumlah	**126.309.872.140.887**	**73.010.201.603.119**

Beban DBH Lainnya merupakan jenis DBH Perkebunan Sawit yang baru mulai diimplementasikan bulan September 2023 berdasarkan PP 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit dan PMK 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit. Rincian Beban DBH Sawit sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022
Beban DBH Perkebunan Sawit	1.536.747.285.034	-

Nilai penambah Beban Dana Bagi Hasil Tahun 2023 sebesar Rp51.987.003.674.227. Jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 2022, nilai penambah beban DBH atas Potensi/Estimasi KB periode 31 Desember 2023 meningkat sebesar Rp6.279.823.929.278 (12,08%). Hal ini disebabkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan di TA 2023 meningkat, sehingga potensi/estimasi Kurang Bayar DBH pada Tahun Anggaran 2023 lebih tinggi.

Nilai pengurang Beban Dana Bagi Hasil atas timbulnya estimasi Piutang DBH Tahun 2023 sebesar Rp2.392.654.411.852 yang jika dibandingkan Tahun 2022 nilai pengurang beban DBH atas potensi LB adalah meningkat sebesar Rp776.437.879.773 (32,45%). Hal ini disebabkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan yaitu penerimaan SDA Kehutanan IIUPH dan PSDH, SDA pertambangan panas bumi – iuran produksi, dan perikanan yang menurun sehingga potensi/estimasi Lebih Bayar DBH pada Tahun Anggaran 2023 lebih tinggi.

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Penambah Beban DBH atas potensi KB	51.987.003.674.227	45.707.179.744.949
2	Pengurang Beban DBH atas potensi LB	2.392.654.411.852	1.616.216.532.079

b. Beban Dana Alokasi Umum (DAU)

Beban Transfer DAU Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp398.029.628.594.542 dan Rp378.000.000.000.000. Beban DAU Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp20.029.628.594.542 atau 5,30% dari periode yang sama Tahun 2022. Kenaikan Beban DAU disebabkan karena meningkatnya pagu DAU TA 2023. Mulai tahun 2023 jenis Dana Alokasi Umum terbagi menjadi dua, terdiri atas DAU yang murni Block Grant dan DAU yang belanjanya sudah ditentukan penggunaannya.

Rincian Beban Dana Alokasi Umum TA 2023 sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022
Transfer Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	288.929.877.774.000	378.000.000.000.000
Transfer Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK	25.741.997.004.000	-
Transfer Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan	1.644.028.375.953	-
Transfer Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan	39.993.776.407.340	-
Transfer Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan	26.023.518.505.877	-
Transfer Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum	15.696.430.527.372	-
Jumlah	**398.029.628.594.542**	**378.000.000.000.000**

Nilai beban Transfer Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp288.929.877.774.000, termasuk didalamnya sebesar Rp2.162.039.188.656 merupakan realisasi beban atas kebijakan DAU Tambahan untuk penggantian komponen THR dan Gaji 13 berupa 50 persen TPG dan/atau Tamsil khusus bagi Guru yang mendapatkan gaji dari APBD dan tidak menerima tunjangan kinerja daerah/TPP.

Penjelasan Dana Transfer Khusus

a. Beban Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Beban Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp50.334.741.347.305 dan Rp54.783.954.054.112. Beban transfer DAK Fisik Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp4.449.212.706.807 atau 8,12%.

b. Beban Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Beban DAK Non Fisik Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp125.341.735.389.619 dan Rp115.071.648.958.276. Beban transfer DAK Non Fisik Tahun Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp10.270.086.431.343 atau 8,92% bila dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh adanya pengakuan piutang selama Periode Tahun 2023, sehingga mengurangi besarnya beban DAK Nonfisik TA 2023. Rincian Beban DAK Nonfisik Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Beban Dana TPG ASND	48.578.118.047.897
Beban Dana TKG ASND	1.616.962.621.824
Beban Dana Tamsil Guru ASND	1.249.638.248.206
Beban Dana BOS	53.365.278.092.392
Beban Dana BOK	10.598.757.900.097
Beban Dana BOKB	2.974.561.728.208
Beban Dana Bantuan BLPS	62.003.157.725
Beban Dana PK2UMK	242.766.765.857
Beban Dana Pelayanan Kepariwisataan	125.749.412.031
Beban Dana BOP PAUD	4.088.407.337.853
Beban Dana BOP Kesetaraan	1.480.979.095.232
Beban Dana BOP Museum & Taman Budaya	165.411.039.978
Beban Dana Pelayanan PPA	109.483.930.186
Beban Dana FPM	232.772.897.862
Beban Dana KPP	292.704.050.000

Uraian	Nilai
Beban PK2SIKM	158.141.064.271
Jumlah	**125.341.735.389.619**

c. Beban Hibah Ke Daerah

Beban Hibah ke Daerah Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.940.874.059.627 dan Rp0. Beban Hibah ke Daerah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 100% dikarenakan pada periode sebelumnya, beban hibah ke daerah tidak tercatat sebagai bagian dari Transfer ke Daerah melainkan pada pos beban hibah yang dikelola oleh BA BUN Pengelola Hibah 999.02. Mulai tahun 2023, Beban Hibah ke Daerah menjadi bagian dari Transfer ke Daerah sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Rincian beban hibah kepada daerah TA 2023 sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	1.977.982.930.618
Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	143.405.713.248
Hibah kepada daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri	819.485.415.761
Total Beban Hibah kepada Daerah	**2.940.874.059.627**

Penjelasan Beban Dana Desa, Insentif Fiskal, Otsus dan Keistimewaan

a. Beban Dana Otonomi Khusus

Beban Dana Otonomi Khusus pada Tahun 2023 sebesar Rp17.241.263.570.000 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk periode pada Tahun 2023. Beban Dana Otonomi Khusus mengalami penurunan sebesar Rp3.195.000.000.000 atau turun 15,63% dibandingkan dengan tahun 2022. Mulai tahun 2023, Dana Otsus terbagi menjadi Dana Otsus yang bersifat umum, Dana Otsus yang ditentukan penggunaannya, dan Dana Tambahan Infrastruktur.

Penurunan Realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2023 disebabkan antara lain pagu alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh turun sangat signifikan pada 2023, yang semula sebesar 2 (dua) persen pada tahun 2022 menjadi 1 (satu) persen dari plafon DAU Nasional pada tahun 2023 sebagaimana diatur dalam Pasal 183 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sesuai dengan Pasal 183 ayat (2) tersebut, Dana Otonomi Khusus Aceh berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun kesatu s.d. kelima belas setara dengan 2% (dua persen) plafon DAU Nasional, dan untuk tahun keenam belas s.d. kedua puluh setara dengan 1% (satu persen) plafon DAU Nasional, dengan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh dialokasikan pertama kali pada tahun 2008.

Rincian Beban Dana Otonomi Khusus sebagaimana berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022
Belanja Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	3.960.000.000.000	7.560.000.000.000
Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum Provinsi Papua	697.537.158.000	5.783.400.000.000
Belanja Dana Tambahan Infrastruktur Papua	734.634.275.000	2.721.600.000.000
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua	871.921.448.000	-
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Selatan	448.666.078.000	-
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Selatan	472.527.485.000	-

Uraian	TA 2023	TA 2022
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Selatan	560.832.598.000	-
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Tengah	734.493.413.000	-
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Tengah	773.555.973.000	-
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Tengah	918.116.766.000	-
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Pegunungan	784.905.913.000	-
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Pegunungan	826.649.561.000	-
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Pegunungan	981.132.390.000	-
Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum Provinsi Papua Barat	665.426.268.000	2.404.194.963.000
Belanja Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	803.970.737.000	1.967.068.607.000
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Barat	831.782.835.000	-
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Barat Daya	628.971.170.000	-
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat Daya	759.925.539.000	-
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Barat Daya	786.213.963.000	-
Total Beban Dana Otsus	**17.241.263.570.000**	**20.436.263.570.000**

b. Beban Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Beban DK DIY Tahun 2023 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan yang telah terbayar setelah dikurangi dengan lebih salur pada periode tersebut. Selanjutnya, jumlah Beban Transfer DK DIY Tahun 2023 sebesar Rp1.348.883.261.656. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 yang sebesar Rp1.272.725.809.224, nilai Beban Dana Keistimewaan mengalami kenaikan sebesar Rp Rp76.157.452.432 atau 5,98%.

c. Insentif fiskal

Beban IF Tahun 2023 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk Tahun 2023. Jumlah Beban IF Tahun 2023 yaitu sebesar Rp7.906.031.813.500 sama dengan realisasi IF Tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 yang sebesar Rp6.993.672.774.000, nilai Beban IF mengalami kenaikan sebesar Rp912.359.039.500 atau 13,05%.

d. Beban Dana Desa

Beban Dana Desa untuk Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp69.895.828.548.550 dan Rp67.906.138.390.431. Beban Transfer Dana Desa Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.989.690.158.119 atau 2,93%.

E.2.2.10. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp27.767.138.903.095 dan Rp28.515.372.568.357. Beban penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi atas Aset Tak Berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp748.233.665.262 atau turun 2,62% bila dibandingkan dengan Tahun 2022. Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2023 dapat dirinci berdasarkan Bagian Anggaran BUN

sebagai berikut:

BA	Uraian	TA 2023	TA 2022
999.03	Pengelola Investasi Pemerintah	808.832.878.745	1.348.040.230.088
999.08	Pengelola Belanja Lain-lain	162.086.389.831	150.176.901.927
999.99	Pengelola Transaksi Khusus	26.796.219.634.519	27.017.155.436.342
Jumlah		**27.767.138.903.095**	**28.515.372.568.357**

a. Beban Penyusutan dan Amortisasi pada BUN Pengelola Investasi Pemerintah (BA 999.03) pada Tahun 2023 yang sebesar Rp808.832.878.745 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp539.207.351.343 atau turun 40,00% bila dibandingkan dengan tahun 2022. Nilai tersebut merupakan pembebanan penyusutan dan amortisasi aset kelolaan yang ditujukan untuk memperoleh pendapatan melalui sewa dan kerja sama periode tahunan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Pembebanan Penyusutan Properti Investasi	797.035.507.448	1.329.552.037.466
2	Pembebanan Penyusutan atas Aset Kelolaan Nonklasifikasi Properti Investasi	11.797.371.297	18.488.192.622
	Jumlah	**808.832.878.745**	**1.348.040.230.088**

b. Beban Penyusutan dan Amortisasi pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain (BA 999.08) pada Tahun 2023 yang sebesar Rp162.086.389.831 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp11.909.487.904 atau naik 7,93% bila dibandingkan dengan tahun 2022. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	BP Batam		
	▪ Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.658.826.287	1.728.809.755
	▪ Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.038.135.543	722.984.814
	▪ Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	131.927.342.280	113.402.903.732
	▪ Beban Penyusutan Irigasi	20.321.000	10.160.500
	▪ Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4.583.847	7.301.026
2	Otoritas Jasa Keuangan		
	▪ Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	252.075.203	252.883.903
	▪ Beban Amortisasi Lisensi	2.480.586.585	4.961.173.892
3	SKK Migas		
	▪ Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	18.391.768.454	19.174.516.289
	▪ Beban Penyusutan Jaringan	1.609.050	1.609.050
	▪ Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	140.906.235	139.358.990
	▪ Beban Amortisasi Software	5.942.203.497	9.560.212.976
	▪ Beban Amortisasi Lisensi	228.031.850	214.987.000
Jumlah		**162.086.389.831**	**150.176.901.927**

c. Beban Penyusutan dan Amortisasi pada BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA 999.99) pada Tahun 2023 yang sebesar Rp26.796.219.634.519 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp220.935.801.823 atau turun 0,82% bila dibandingkan dengan tahun 2022. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi pada BUN Pengelola Transaksi Khusus tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Beban penyusutan aset eks pertamina	389.095.046.690	707.143.125.959
2	Beban penyusutan aset pada pengelola BMN Idle	528.986.757	489.208.550
3	Beban penyusutan aset pada PKP2B	612.736.199.419	703.347.938.509

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
4	Beban penyusutan aset KKKS pada PPBMN	-	305.932.219
5	Beban penyusutan aset KKKS pada SKK Migas	25.585.774.522.719	25.233.134.622.915
6	Beban penyusutan aset KKKS pada BPMA	201.919.721.188	366.569.450.444
7	Beban penyusutan aset pada pengelola aset lain-lain	6.165.157.746	6.165.157.746
Jumlah		**26.796.219.634.519**	**27.017.155.436.342**

E.2.2.11. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar minus Rp2.426.602.692.679 dan Rp14.826.408.996.259. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp17.253.011.688.938 atau turun 116,37% bila dibandingkan dengan Tahun 2022. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Penurunan terbesar terjadi pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (999.99) salah satunya karena penambahan nilai piutang pada BLBI Tahun 2023 tidak sebesar piutang pada tahun 2022 dan adanya pelunasan piutang sehingga beban penyisihan piutangnya turun jika dibandingkan dengan Tahun 2022. Beban tersebut merupakan beban penyisihan piutang tak tertagih – piutang jangka pendek dengan rincian sebagai berikut:

BA	Uraian	TA 2023	TA 2022
999.03	Pengelola Investasi Pemerintah	(3.249.727.244.519)	(295.013.403.881)
999.04	Pengelola Pemberian Pinjaman	2.288.790.574.086	1.066.242.798.604
999.07	Pengelola Belanja Subsidi	6.175.000.000	(51.507.567)
999.08	Pengelola Belanja Lain-Lain	287.969.820.936	32.066.091
999.99	Pengelola Transaksi Khusus	(1.759.810.843.182)	14.055.199.043.012
Jumlah		**(2.426.602.692.679)**	**14.826.408.996.259**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada BA 999.03 sebesar minus Rp3.249.727.244.519 merupakan beban penyisihan piutang tidak tertagih–piutang PNBP dan beban dana bergulir diragukan tertagih lainnya. Perhitungan Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir – Kementerian Negara/Lembaga mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 158/PMK.06/2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Non-Permanen dalam Bentuk Tagihan.

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada BA BUN 999.03 dapat dirinci berdasarkan Kuasa Pengguna Anggaran sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	KPA Direktorat PNBP DJA (984501)	6.650.000.000	6.500.000.000
2	KPA BLU Set BPJT (984102)	(3.490.953.428.945)	(376.363.580.289)
3	KPA BLU LPMUKP (984848)	15.578.472.498	24.210.341.712
4	KPA Dit. SMI (961617)	95.995.937.444	50.639.834.696
5	KPA BLU BPDLH (955787)	123.001.774.484	-
	Jumlah	**(3.249.727.244.519)**	**(295.013.403.881)**

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada BA BUN Pengelola Investasi Pemerintah (999.03) adalah sebagai berikut:

1. KPA Direktorat PNBP DJA (984501)

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2023 dan TA 2022 masing-masing sebesar

Rp6.650.000.000 yang berasal dari Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Perum Perumnas.

2. KPA Set BPJT (984102)

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Pokok Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar minus Rp3.490.953.428.945 dan minus Rp376.363.580.289. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencadangkan investasi non permanen BLU yang tak tertagih. Beban penyisihan piutang bernilai negatif dengan kenaikan cukup signifikan dikarenakan adanya perubahan kualitas dana bergulir dari semula "Macet" menjadi "Kurang Lancar". Hal itu dilatarbelakangi oleh perjanjian atau restrukturisasi Dana Bergulir antara BUJT dan BPJT.

3. KPA BLU LPMUKP (984848)

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih berasal dari saldo akhir akun-akun Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada buku besar akrual yang merupakan transaksi perhitungan akuntansi atas penyajian nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Pokok Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp15.578.472.498 dan Rp24.210.341.712.

Beban Penyisihan Piutang tak tertagih tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp8.631.869.214) atau (35,65%). Beban penyisihan piutang pada BLU LPMUKP terjadi karena meningkatnya nilai pencairan Dana Bergulir serta menurunnya angsuran pokok selama periode Tahun 2023..

4. KPA Dit. SMI (961671)

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Pokok Tak Tertagih Tahun 2023 pada Direktorat SMI sejumlah Rp95.995.937.444 berasal dari beban penyisihan piutang tak tertagih pada BLU BPDLH dengan rincian sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Saldo Piutang 31 Des 2023	Pengurangan Nilai Jaminan	Saldo Setelah dikurangi Jaminan	Tarif	Penyisihan Tahun 2023
Lancar	806.120.650.501	93.565.658.635	712.554.991.866	0,50%	3.562.774.959
Kurang Lancar	23.597.634.008	456.000.000	23.141.634.008	10%	2.314.163.401
Diragukan	107.860.769.256	116.872.403.670	(9.011.634.414)	50%	(4.505.817.207)
Macet	345.798.813.323	101.912.934.113	243.885.879.210	100%	243.885.879.210
Lunas Pokok	(31.295.137)	-	(31.295.137)		-
Total	**1.283.346.571.951**	**312.806.996.418**	**970.539.575.533**		**245.257.000.363**
Saldo Penyisihan Tahun 2022 (*Audited*)					**149.261.062.919**
Pengakuan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 (*Audited*)					**95.995.937.444**

Pada BLU BPDLH mulai tahun 2021, sesuai dengan rekomendasi BPK sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan BA Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun 2020 pada UAKPA BUN BPDLH yang disampaikan oleh Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan kepada Direktur Utama BLU BPDLH sebagai tembusan melalui ND-805/PB.6/2021, dilakukan perhitungan jaminan sebagai pengurang penyisihan piutang. Berdasarkan pendataan yang dilakukan, Nilai perhitungan jaminan ini akan terus bertambah seiring dengan proses pendataan yang saat ini tengah dilakukan.

5. KPA BLU LPDB KUMKM

Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir periode Tahun 2023 sebesar Rp123.001.774.484 merupakan dana bergulir yang diragukan tertagih termasuk dana bergulir yang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas dasar jumlah piutang dana bergulir. Perhitungan Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir-Kementerian/Lembaga mengacu

pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Non-Permanen dalam Bentuk Tagihan.

1. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih dari BA BUN Pengelola Pemberian Pinjaman (999.04) Tahun 2023 sebesar Rp2.288.790.574.086 mengalami kenaikan sebesar Rp1.222.547.775.482 atau naik 114,66% dari tahun 2022 sebesar Rp1.066.242.798.604.

Kenaikan signifikan pada beban penyisihan piutang - bagian lancar penerusan pinjaman dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 dan 66 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) masing-masing sebesar Rp456.253.222.285 dan Rp1.955.049.413.943,56.

Sebelumnya utang pada BUMN tersebut merupakan pengalihan piutang PT Garam, PG Rajawali II, PT PPI, PT Sang Hyang Seri, dan Perum Perindo kepada PT RNI. Selain itu, adanya pula pengalihan piutang PT PAL dan PT Pindad kepada PT LEN Industri. Hal ini merupakan tindak lanjut adanya pembentukan PT RNI yang ditunjuk sebagai BUMN Holding Pangan dan pembentukan PT LEN Industri yang ditunjuk sebagai BUMN Holding Industri dan Pertahanan oleh Kementerian BUMN.

Rincian Beban Penyisihan Piutang pada BUN Pengelola Pemberian Pinjaman sebagaimana tabel berikut:

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Beban Penyisihan Piutang - Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	2.529.951.643.803	719.869.528.200
2	Beban Penyisihan Piutang - Piutang Bunga Pemberian Pinjaman	(218.531.471.032)	366.105.887.990
3	Beban Penyisihan Piutang – Piutang Denda Pemberian Pinjaman	8.298.280.185	514.797.332
4	Beban Penyisihan Piutang - Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	(21.606.440.019)	(9.481.780.407)
5	Beban Penyisihan Piutang - Aset Lainnya Kredit Program	(9.321.438.851)	(10.765.634.511)
Jumlah		**2.288.790.574.086**	**1.066.242.798.604**

2. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2023 dari BA BUN Pengelola Belanja Subsidi (999.07) sebesar Rp6.175.000.000 merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah beban penyisihan piutang tak tertagih Tahun 2023 sebesar Rp6.175.000.000 terdapat pada Satker Ditjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian.

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Beban penyisihan Piutang Tak Tertagih dari piutang subsidi -Kementerian BUMN	-	-
2	Beban Penyisihan piutang atas kelebihan pembayaran subsidi pupuk -Kementerian Pertanian	6.175.000.000	(51.507.567)
3	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas piutang karena kelebihan bayar subsidi lisitrik regular - Ditjen Anggaran	-	-
Jumlah		**6.175.000.000**	**(51.507.567)**

3. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2023 pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain (BA 999.08) sebesar Rp287.969.820.936 merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Beban tersebut merupakan beban penyisihan piutang tak tertagih –

piutang jangka pendek. Beban penyisihan piutang terdapat pada:

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Kementerian Pertanian	287.456.616.740	(558.039)
2	Kementerian Kominfo	45.489.439	61.314.529
3	MPP Kartu Prakerja	553.313.000	809.601
4	Otoritas Jasa Keuangan	(119.223.400)	(29.500.000)
5	Kementerian Keuangan	31.993.583	-
6	SKK Migas	1.631.547	
Jumlah		**287.969.820.936**	**32.066.091**

Tata cara pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga. Dalam Pasal 4 (3) disebutkan bahwa selisih penurunan penyisihan piutang tidak tertagih antara saldo penyisihan piutang tidak tertagih pada tanggal pelaporan menurut daftar perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih dengan saldo penyisihan piutang tidak tertagih pada neraca percobaan sebelum penyesuaian diakui sebagai pengurang (dikredit ke) beban penyisihan piutang tidak tertagih dan sebagai pengurang (didebet ke) penyisihan piutang tidak tertagih. Pasal 4 (4) menyebutkan bahwa dalam hal selisih penurunan penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebabkan beban penyisihan piutang tidak tertagih bersaldo negatif (kredit), disajikan di dalam Laporan Operasional sebagai beban negatif.

4. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2023 dari BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA 999.99) sebesar minus Rp1.759.810.843.182 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Beban Penyisihan Piutang pada Pengelola Dana Pensiun & THT	667.995.691	658.311.314
2	Beban Penyisihan Piutang pada Pengelola Aset BLBI	1.806.366.692.066	11.884.286.072.567
3	Beban Penyisihan Piutang pada Pengelola Aset Satker KKKS	(639.667.902)	12.264.517.820
4	Beban Penyisihan Piutang pada Pengelola Aset Supersemar	47.062.433.591	404.210.537.686
5	Beban Penyisihan Piutang pada pengelola PNBP Migas	(240.825.470.367)	175.486.788.127
6	Beban Penyisihan Piutang pada Pengelola Kas Negara	-	(317.680.941)
7	Beban Penyisihan Piutang pada Pengelola Aset BPLS	148.514.851.485	1.578.610.496.439
Jumlah		**1.759.810.843.182**	**14.055.199.043.012**

E.2.2.12. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp285.685.594.646.021 dan Rp410.181.311.446.044. Beban Lain-lain pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp124.495.716.800.023 atau turun 30,35% bila dibandingkan dengan Tahun 2022. Penurunan signifikan terjadi pada beban lain-lain BUN Lainnya Dana Kompensasi. Kompensasi sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar Rp200,89 T, turun Rp139,85 T dari tahun 2022 sebesar Rp340,74 T, sebagai berikut, listrik naik Rp9,1 T karena kenaikan volume listrik sebesar 11,1 TWh dari 205,9 TWh menjadi 217 TWh. BBM turun Rp149 T karena penurunan realisasi rata-rata ICP yang relatif drastis dari 97 USD/bbl pada 2023 menjadi 80 USD/bbl pada 2022, meskipun di sisi lain kurs meningkat tipis dari Rp14.770/USD menjadi Rp15.174/USD namun secara keseluruhan dampaknya tidak signifikan. Selain itu kenaikan harga jual eceran minyak solar sebesar Rp1.650/liter dari Rp5.150/liter menjadi Rp6.800/liter pada bulan September turut menurunkan dana kompensasi energi tahun 2023.

Beban Lain-lain bila dirinci berdasarkan pengelola sebagai berikut:

BA	Uraian	TA 2023	TA 2022
999.03	Pengelola Investasi Pemerintah	30.071.958.447.946	8.754.397.169.969
999.08	Pengelola Belanja Lain-lain	227.868.924.522.553	363.060.552.806.547
999.99	Pengelola Transaksi Khusus	28.126.443.685.484	38.562.371.803.632
999.99	Eliminasi Beban Lain-lain	(381.732.009.962)	(196.010.334.104)
Jumlah		**285.685.594.646.021**	**410.181.311.446.044**

1. Beban Lain-Lain pada BA BUN Pengelola Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03)

Beban Lain-lain pada BUN Pengelola Investasi Pemerintah pada Tahun 2023 sebesar Rp30.071.958.447.946 merupakan Beban Penyesuaian Nilai Investasi. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar Rp21.317.561.277.978 atau naik 243,51% utamanya dikarenakan kenaikan pada KPA Kementerian BUMN. Rincian Beban penyesuaian nilai investasi sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Beban Penyesuaian nilai investasi UAIP	553.996.829.070	122.849.327.751
2	Beban Penyesuaian nilai investasi KPA Kementerian BUMN	11.394.338.053.675	5.507.023.288.710
3	Beban Penyesuaian nilai investasi KPA DJKN	18.117.843.166.212	3.114.554.000.000
4	Beban Penyesuaian Nilai Investasi Pemerintah Dit SMI	5.780.398.989	-
5	Beban Penyesuaian nilai investasi Badan Bank Tanah	-	9.970.553.508
	Jumlah	**30.071.958.447.946**	**8.754.397.169.969**

Beban Penyesuaian nilai investasi UAIP

Beban Penyesuaian nilai investasi pada Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp553.996.829.070 dan Rp122.849.327.751, terdapat peningkatan sebesar Rp 431.147.501.319 atau 350,96%. Rincian Beban Penyesuaian Nilai Investasi UAIP adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	BPJS Kesehatan	404.287.397.420	122.849.327.751
2	Institut Teknologi Bandung	149.709.431.650	-
Jumlah		**553.996.829.070**	**122.849.327.751**

Beban Penyesuaian nilai investasi KPA Kementerian BUMN

Beban penyesuaian yang dibukukan BUMN/Badan Usaha di bawah Kementerian BUMN senilai Rp11.394.338.053.675 merupakan bagian pemerintah atas rugi operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan perusahaan negara di bawah Kementerian BUMN dalam Laporan Keuangan. Beban Penyesuaian Nilai Investasi pada Kementerian BUMN terdiri dari :

1. Beban Penyesuaian Nilai Investasi Non Permanen sebesar Rp3.050.095.695 merupakan perubahan penyisihan nilai investasi non permanen dari PT KAI (Persero) dan PTPN III dari tahun 2022 ke tahun 2023.
2. Bagian pemerintah atas rugi operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan perusahaan negara di bawah Kementerian BUMN dalam Laporan Keuangan sebesar Rp11.391.287.957.980 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	BUMN Persero	11.242.911.042.182	5.031.081.370.056
2	BUMN Perum	148.376.915.798	469.936.201.154
3	Non BUMN	-	-
	Jumlah	**11.391.287.957.980**	**5.501.017.571.210**

Realisasi beban dari bagian rugi pemerintah pada perusahaan negara tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp5.890.270.386.771 atau naik 107,08% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022. Peningkatan bagian rugi pemerintah (beban) ini sebagian besar dikontribusikan oleh peningkatan kerugian beberapa Persero pada klaster infrastruktur, kesehatan, dan manufaktur. Hal ini disebabkan adanya penurunan nilai atas Pekerjaan Dalam Proses Konstruksi (PDPK) pada klaster infrastruktur, penurunan pendapatan sebesar 31,8% pada klaster manufaktur serta penurunan penjualan produk terkait Covid-19 dan impairment produk Covid-19 yang tidak dapat diserap pasar pada klaster industri kesehatan.

Sementara itu, bagian rugi pemerintah (beban) Perum mengalami perbaikan (turun 68,43%) menjadi sebesar Rp148.376.915.798..

Beban Penyesuaian nilai investasi KPA DJKN

Beban Penyesuaian nilai investasi KPA DJKN pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp18.117.843.166.212 dan Rp3.114.554.000.000 atau mengalami peningkatan sebesar Rp15.003.289.166.212 atau 481,72% dari beban tahun 2022 . Nilai tersebut berasal dari rugi PT TPI sebesar Rp3.516.166.211 dan LPEI sebesar Rp18.114.327.000.000.

Pada periode 2023, terdapat penambahan BUMN yang dicatat pada KPA DJKN yaitu PT Bina Karya (PT BIKA). PT BIKA pada periode 2023 mencatatkan rugi sebesar Rp16.905.807.305, dan mencatatkan ekuitas bersaldo negatif sebesar minus Rp5.853.254.747. Berdasarkan PMK 174 tahun 2023, dalam hal terdapat nilai beban penyesuaian nilai invesatsi di LO tahun berjalan menyebabkan penyajian nilai outstanding Investasi permanen di Neraca menjadi nilai negatif (saldo buku besar Investasi kredit), maka nilai outstanding negatif tersebut tidak disajikan sebagai Investasi permanen dalam pos Investasi jangka panjang di Neraca tetapi dijelaskan secara memadai di CaLK.

Beban Penyesuaian nilai investasi KPA Direktorat SMI

Beban Penyesuaian nilai investasi KPA Direktorat SMI pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp5.780.398.989 dan Rp0. Nilai tersebut merupakan rugi selisih kurs yang terjadi akibat pelemahan atau depresiasi rupiah, serta penyesuaian akibat pembulatan dan sebab lainnya disajikan pada akun Beban Penyesuaian Nilai Investasi pada BLU LPDP.

Beban Penyesuaian nilai investasi KPA Badan Bank Tanah

Beban Penyesuaian nilai investasi KPA Badan Bank Tanah pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp0 dan Rp9.970.553.508. Pada periode 2023 KPA Bank Tanah tidak membukukan beban, sedangkan pada 2022 terdapat beban senilai Rp9.970.553.508 merupakan bagian pemerintah atas rugi pada tahun 2022.

2. Beban Lain-Lain pada BA BUN Pengelola Belanja Lain-lain (BA BUN 999.08)

Beban Lain-lain dari BUN Pengelola Belanja Lain-lain (BA 999.08) sebesar Rp227.868.924.522.553 mengalami penurunan sebesar Rp135.191.628.283.994 atau turun 37,24% bila dibandingkan dengan tahun 2022. Penurunan ini terjadi salah satunya karena penurunan beban lain-lain Dana Kompensasi. Belanja Lain-lain pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Beban Cadangan Beras Pemerintah	21.907.297.958.895	3.711.471.783.128
2	Beban OAB PNS Distrik Pedalaman Papua dan Papua Barat	110.372.876.508	131.714.188.176
3	Beban Lain-Lain Dana Kompensasi	200.888.732.293.042	340.739.237.539.248

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
4	Beban Lain-lain Program Kartu Prakerja	-	16.332.056.618.484
5	Beban Lain-Lain	4.962.521.394.108	2.146.072.677.511
Jumlah		**227.868.924.522.553**	**363.060.552.806.547**

a. Beban Cadangan Beras Pemerintah sebesar Rp21.907.297.958.895. Jumlah tersebut adalah pembayaran kepada Perum Bulog untuk Bantuan Pangan Tahap I dan Penyaluran CPP untuk SPHP TW I-III Tahun 2023 sebesar Rp9.773.567.393.008 dan sebesar Rp12.133.730.565.887, merupakan koreksi atas estimasi kekurangan bayar CPP komoditas beras tahun 2023.

b. Beban ongkos angkut beras PNS Distrik Pedalaman Papua dan Papua Barat sebesar Rp110.372.876.508 terdapat pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua dan Papua Barat

c. Beban Lain-lain Dana Kompensasi sebesar Rp200.888.732.293.042 dapat dirinci sebagaimana berikut:

No	Uraian Kompensasi	Jumlah
a	PT Pertamina Patra Niaga JBT Minyak Solar Triwulan I	20.499.682.729.955
b	PT Pertamina Patra Niaga JBKP Pertalite Triwulan I	11.407.313.519.507
c	PT AKR Corporindo JBT Minyak Solar Triwulan I	169.435.772.363
d	Kompensasi Listrik PT PLN (Persero) Triwulan I	18.387.491.971.936
e	PT Pertamina Patra Niaga JBT Minyak Solar Triwulan II	11.675.957.591.497
f	PT Pertamina Patra Niaga JBKP Pertalite Triwulan II	11.160.842.026.150
g	PT AKR Corporindo JBT Minyak Solar Triwulan II	87.564.156.286
h	PT Pertamina Patra Niaga JBT Minyak Solar Triwulan III	16.639.795.715.141
i	PT Pertamina Patra Niaga JBKP Pertalite Triwulan III	11.344.274.731.432
j	PT AKR Corporindo JBT Minyak Solar Triwulan III	141.364.900.739
k	Kompensasi Listrik PT PLN (Persero) Triwulan II	19.340.393.528.057
l	Kompensasi Listrik PT PLN (Persero) Triwulan III	18.451.196.536.095
m	Kekurangan Kompensasi BBM Tahun 2023 pada PT Pertamina Patra Niaga berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-233/MK.05/2024 tanggal 13 Maret 2024 Hal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak Solar dan JBKP Bensin (Gasoline) RON 90 Periode Tahun 2023	43.520.357.185.487
n	Kekurangan Kompensasi BBM Tahun 2023 pada PT AKR Corporindo, Tbk berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-232/MK.05/2024 tanggal 13 Maret 2024 Hal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk akibat Penetapan HJE JBT Minyak Solar Tahun 2023	232.578.572.757
o	Kompensasi Listrik Periode Tahun 2023 pada PT PLN (Persero) berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-234/MK.05/2024 tanggal 13 Maret 2024 hal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT PLN (Persero) akibat Penetapan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2023	17.835.197.231.014
p	Koreksi Beban dan utang dana kompensasi BBM berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lembaga Pemeriksa yang berwenang (JBT Solar PT PPN)	(3.553.645.877)
q	Koreksi Beban kompensasi BBM berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lembaga Pemeriksa yang berwenang (JBKP Pertalite PT PPN)	(1.097.944.133)
r	Koreksi Beban dan utang dana kompensasi BBM berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lembaga Pemeriksa yang berwenang (JBT Solar PT AKR)	(62.285.364)
	Jumlah	**200.888.732.293.042**

d. Beban lain-lain sebesar Rp4.962.521.394.108 terdapat pada:

1) Istana Kepresidenan Jakarta sebesar 127.883.585.451 merupakan beban untuk keperluan dana bantuan kemasyarakatan Presiden (terdapat Koreksi atas Belanja Operasional Presiden yang hingga akhir tahun anggaran (31 Desember) belum disetorkan ke RKUN) berdasarkan pada NKS tanggal 2 Mei 2024;

2) Sekretariat Wakil Presiden sebesar Rp31.408.183.486 merupakan beban untuk keperluan dana bantuan kemasyarakatan Wakil Presiden;

3) Ditjen PPI Kemenkominfo sebesar Rp357.022.697.235 merupakan beban yang digunakan untuk bantuan operasional Layanan Pos Universal;

4) BP Batam sebesar Rp29.999.124.524 merupakan beban operasional kegiatan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun;

5) SKK Migas sebesar Rp1.661.381.921.393 merupakan beban operasional kegiatan SKK Migas. Terdapat Koreksi untuk mencatat tunggakan yang belum disajikan pada Neraca per 31 Desember 2023 sebesar 2.832.662.915.

6) MPPK sebesar Rp2.754.825.882.018 merupakan beban operasional kegiatan MPPKP.

3. Beban Lain-Lain pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA BUN 999.99)

Sedangkan Beban Lain-lain dari BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA BUN 999.99) Tahun 2023 sebesar Rp28.126.443.685.484 mengalami penurunan sebesar Rp10.435.928.118.148 atau turun 27,06% bila dibandingkan dengan Tahun 2022. Beban Lain-lain Pengelola Transaksi Khusus bila dirinci menurut satuan kerja sebagai berikut:

Beban Lain-lain	Saldo Akhir
UAPBUN TK DJPb	707.431.053.820
UAPBUN TK DJA	27.419.012.631.664
Jumlah	**28.126.443.685.484**

UAPBUN TK DJPb:

Beban Lain-lain pada UAPBUN TK DJPb adalah sebesar Rp707.431.053.820 merupakan Belanja lain-lain yang berasal dari satker 987361, 999257, 999928 dan 999981 dengan rincian sebagai berikut:

Akun	Deskripsi Akun	Saldo Akhir	Satker
581316	Beban Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	121.245.799.637	987361
581415	Beban Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	546.572.902.378	999981
581415	Beban Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	77.571.373	999928
581423	Beban Lain lain Penggunaan PNBP BUN	39.534.780.432	999257
	Jumlah	**707.431.053.820**	

UAPBUN TK DJA:

Beban Lain-lain pada UAPBUN TK DJA adalah sebesar Rp27.419.012.631.664 merupakan Beban lain-lain yang berasal dari satker 984572 dan 984588 yang dirinci sebagai berikut:

Akun	Deskripsi Akun	Saldo Akhir	Satker
596312	Beban Pihak Ketiga Migas – Pajak Penerangan Jalan non PLN ke Pemda	375.142.063	984572
596313	Beban Pihak Ketiga Migas – DMO Fee KKKS	7.446.795.948.188	984572
596314	Beban Pihak Ketiga Migas – Reimbursement PPN KKKS	9.413.358.823.013	984572
596315	Beban Pihak Ketiga Migas – Underlifting KKKS	8.710.632.696.910	984572
596316	Beban Pihak Ketiga Migas – Fee Penjualan Migas Bagian Negara	406.481.209.046	984572
596321	Beban Pihak Ketiga Panas Bumi - Reimbursement PPN	152.398.856.442	984588
596322	Beban Pihak Ketiga Panas Bumi - Penggantian Bonus Produksi	109.575.132.791	984588
596323	Beban diestimasi - Reimbursement PPN	367.101.143.558	984588
596324	Beban diestimasi - PBB Panas Bumi	430.561.669.691	984588
596326	Beban diestimasi - setoran kepada Pemerintah	381.732.009.962	984588
	Jumlah	**27.419.012.631.664**	

Selama tahun 2023, beban yang timbul dari kewajiban Pemerintah adalah sebesar Rp27.419.012.631.664. Selama tahun 2023, beban yang timbul dari kewajiban Pemerintah sektor migas adalah sebesar Rp25.977.643.819.220 dan sektor panas bumi sebesar Rp1.441.368.812.444.

E.2.3 . Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non operasional pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar surplus Rp61.050.114.639.751 dan defisit Rp136.076.943.706.849. Surplus (Defisit) kegiatan non operasional pada Tahun 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp197.127.058.346.600 atau naik 144,86% bila dibandingkan dengan Tahun 2022. Kenaikan tersebut berasal dari surplus (defisit) Selisih Kurs belum terealisasi pada BA BUN Pengelola Utang. Surplus tahun 2023 berasal dari defisit pelepasan aset non lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus kegiatan non operasional lainnya dan bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebagaimana rincian berikut:

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(548.331.294.499)	(81.309.693.787)
2	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	(431.442.410.900)	(1.337.452.801.614)
3	Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	62.029.888.345.150	(134.658.181.211.448)
Jumlah		**61.050.114.639.751**	**(136.076.943.706.849)**

E.2.3.1. Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar defisit Rp548.331.294.499 dan defisit Rp81.309.693.787. Defisit Pelepasan Aset Non Lancar mengalami kenaikan defisit sebesar Rp467.021.600.712 atau defisitnya naik 574,37% bila dibandingkan dengan tahun yang lalu. Kenaikan defisit ini terjadi utamanya karena kenaikan beban pelepasan aset non lancar BA BUN Pengelola Transaksi Khusus yaitu pada satker Pengelola Aset KKKS SKK Migas.

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2023 sebesar Rp548.331.294.499 bila dibandingkan dengan tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	92.339.321.999	111.168.115.313
2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	640.670.616.498	192.477.809.100
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		**(548.331.294.499)**	**(81.309.693.787)**

Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar pada Tahun 2023 berdasarkan BA BUN dapat dirinci sebagai berikut:

BA	Uraian	TA 2023	TA 2022
999.08	Pengelola Belanja Lain-lain	(9.956.622.675)	(72.521.057.126)
999.99	Pengelola Transaksi Khusus	(538.374.671.824)	(8.788.636.661)
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		**(548.331.294.499)**	**(81.309.693.787)**

1. Defisit Pelepasan Aset Non Lancar pada Tahun 2023 pada BA BUN Pengelola Belanja Lain-lain (999.08) sebesar Rp9.956.622.675 terdiri dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp6.543.456 pada satker SKK Migas dan Beban Kerugian Pelepasan Aset sebesar Rp9.963.166.131 yang terdapat pada:
   a. Satker OJK sebesar Rp5.629.698.912 merupakan dampak hibah BMN yang masih memiliki nilai buku ke OJK sebagai Unit Badan Lainnya Bukan Satker. Nilai tersebut berasal dari penghapusan BMN Aset Takberwujud sebesar Rp4.631.821.566 dan BMN Aset Tetap Lain sebesar Rp997.877.346;
   b. Satker BP Batam sebesar Rp3.067.899.000 merupakan beban pelepasan atas pekerjaan yang dikoreksi dikarenakan kesalahan penempatan kode barang dan kelebihan pencatatan;
   c. Satker SKK Migas sebesar Rp1.265.568.219
2. Defisit Pelepasan Aset Non Lancar pada Tahun 2023 terdapat pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (999.99) sebesar defisit Rp538.374.671.824 terdiri dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp92.332.778.543 dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar Rp630.707.450.367 dan dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai	TA 2023
1	**Satker DJKN PKP2B (984555)**		**(150.130.138.454)**
	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	6.299.444.000	
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	156.429.582.454	
2	**Satker DJKN Pengelola Aset Lain-lain (984594)**		**(642.095.281)**
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	642.095.281	
3	**Satker DJKN Pengelola Aset KKKS pada PPBMN (999242)**		**(2.075.209.375)**
	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	3.513.577.000	
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	5.588.786.375	
4	**Satker DJKN Pengelola Aset KKKS pada SKK Migas (999904)**		**(382.095.277.707)**
	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	80.207.609.241	
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	462.302.886.948	
5	**Satker DJKN Pengelola Aset KKKS pada BPMA (999905)**		**-**
	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		

No	Uraian	Nilai	TA 2023
6	**Satker DJKN Pengelola ABMAT (984608)**		**(5.419.866.000)**
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	5.419.866.000	
7	**Satker DJKN Pengelola Aset BLBI (978706)**		**1.784.115.338**
	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	2.078.697.484	
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	294.582.146	
8	**Satker DJKN Pengelola Aset eks Pertamina (984413)**		**233.450.818**
	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	233.450.818	
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar		
9	**Satker DJKN Pengelola BMN Idle (984614)**		**(29.651.163)**
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	29.651.163	
Jumlah			**(538.374.671.824)**

E.2.3.2. Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar defisit Rp431.442.410.900 dan defisit Rp1.337.452.801.614. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang pada Tahun 2023 mengalami penurunan defisit sebesar Rp906.010.390.714 atau 67,74% bila dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan karena tidak terdapat belanja pembayaran *Loss on Bond Redemption* atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Valas. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang pada Tahun 2023 berasal dari BA BUN Pengelola Utang (999.01) yang merupakan Beban *Pembayaran Loss on Bond Redemption* atas Pembelian Kembali Obligasi Negara (*Debtswitch*) dalam rupiah. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang pada Tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun 2022 dapat dilihat pada rincian berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022
Gain on bond redemption atas pembelian kembali obligasi negara jangka panjang	105.211.500.000	-
Loss on bond redemption atas pembelian kembali obligasi negara	(536.653.910.900)	(444.585.600.000)
Loss on bond redemption atas pembelian kembali obligasi negara valas	-	(892.867.201.614)
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	**(431.442.410.900)**	**(1.337.452.801.614)**

E.2.3.3. Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar surplus Rp62.029.888.345.150 dan defisit Rp134.658.181.211.448. Surplus (defisit) ini mengalami kenaikan sebesar Rp196.688.069.556.598 atau 146,06% bila dibandingkan dengan Tahun 2022.

BA	Uraian	TA 2023	TA 2022
999.01	Pengelola Utang	29.996.260.087.088	(168.844.746.016.217)
999.02	Pengelola Hibah	-	171.767.554.842
999.03	Pengelola Investasi Pemerintah	(73.266.160.988)	2.240.426.369.250
999.04	Pengelola Penerusan Pinjaman	(58.082.961.244)	653.556.837.626
999.05	Pengelola Transfer ke Daerah	335.480.385.568	116.753.541.918
999.07	Pengelola Belanja Subsidi	19.375.748.690	553.455.768.731
999.08	Pengelola Belanja Lain-Lain	34.748.330.594	343.291.470.347

BA	Uraian	TA 2023	TA 2022
999.99	Pengelola Belanja Transaksi Khusus	31.775.372.915.442	30.107.313.262.055
Jumlah		**62.029.888.345.150**	**(134.658.181.211.448)**

Surplus sebesar Rp62.029.888.345.150 terdiri dari surplus selisih kurs belum terealisasi sebesar Rp28.531.381.481.808 dan surplus kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp33.498.506.863.342. Rincian Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya berdasarkan Bagian Anggaran BUN.

Surplus Dari Selisih Kurs Belum Terealisasi

Surplus Dari Selisih Kurs Belum Terealisasi sebesar Rp28.531.381.481.808 apabila dirinci berdasarkan Bagian Anggaran BUN adalah sebagai berikut:

BA	Uraian	TA 2023	TA 2022
999.01	Pengelola Utang	29.996.279.583.634	(172.084.465.902.995)
999.03	Pengelola Investasi Pemerintah	(242.329.465.326)	2.224.985.787.320
999.04	Pengelola Pemberian Pinjaman	(58.082.961.250)	653.556.837.624
999.08	Pengelola Belanja Lain-Lain	33.667.650	(289.145.700)
999.99	Pengelola Belanja Transaksi Khusus	(1.164.519.342.900)	8.754.000.470.752
Jumlah		**28.531.381.481.808**	**(160.452.211.952.999)**

1. BA 999.01

Surplus dari Selisih Kurs Belum Terealisasi pada Bagian Anggaran BUN Pengelola Utang (999.01) sebesar Rp29.996.279.583.634 tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Selisih Kurs yang belum terealisasi sebesar Rp41.462.813.038.358 yang merupakan pendapatan atas selisih antara nilai neraca dan nilai transaksi kewajiban dengan Beban Selisih Kurs yang belum terealisasi sebesar Rp11.466.533.454.724 yang merupakan beban atas selisih antara nilai neraca dan nilai transaksi kewajiban. Kenaikan pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi dan penurunan beban kerugian selisih kurs yang belum terealisasi disebabkan utamanya karena kenaikan nilai tukar Rupiah pada mata uang asing pada 31 Desember 2023 apabila dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Pendapatan dan Beban selisih kurs dapat dirinci antara selisih kurs atas pinjaman dan selisih kurs atas SBN sebagaimana tabel berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022
Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	**41.462.813.038.358**	**16.096.522.130.835**
Surat Berharga Negara	18.805.028.581.000	4.713.238.930.000
Pinjaman	22.657.784.457.358	11.383.283.200.835
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	**11.466.533.454.724**	**188.180.988.033.830**
Surat Berharga Negara	4.856.601.405.000	102.247.308.191.000
Pinjaman	6.609.932.049.724	85.933.679.842.830
Jumlah	**29.996.279.583.634**	**(172.084.465.902.995)**

2. BA 999.03

Surplus (Defisit) Selisih Kurs Belum Terealisasi pada BUN Pengelola Investasi Pemerintah (999.03) pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar defisit Rp242.329.465.326 dan surplus Rp2.224.985.787.320. Defisit dari Selisih Kurs Belum Terealisasi pada BUN Pengelola Investasi Pemerintah pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.467.315.252.646 atau 110,89% bila dibandingkan dengan tahun 2022. Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BA 999.03 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Pendapatan selisih kurs belum terealisasi	173.657.754	2.226.578.271.971
2	Beban selisih kurs belum terealisasi	242.503.123.080	1.592.484.651
Jumlah		**(242.329.465.326)**	**2.224.985.787.320**

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional merupakan pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi pada UAKPA BKF yaitu adanya penurunan kewajiban Indonesia pada LKI dalam rupiah yang diakibatkan oleh adanya perubahan nilai tukar yang menggunakan mata uang asing dalam pencatatannya. Pada 2023 pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi sebesar Rp173.657.754 berasal dari kenaikan nilai investasi pemerintah. Rincian peningkatan investasi akibat selisih kurs sebagaimana berikut:

No	LKI	31 Desember 2022	31 Desember 2023	Pendapatan Selisih Kurs
1	*Multilateral Investment and Gyarantee Agency* (MIGA)	17.697.200.656	17.523.542.902	173.657.754
	Total	**17.697.200.656**	**17.523.542.902**	**173.657.754**

Kurs penutup yang digunakan untuk transaksi dengan mata uang Dollar merupakan kurs JISDOR pada sistem SPAN untuk tanggal 31 Desember 2023 atau sama dengan kurs JISDOR BI tanggal 29 Desember 2023. Sedangkan kurs penutup Euro yang digunakan adalah JISDOR pada sistem SPAN tanggal 31 Desember 2023. Sementara itu, untuk transaksi dengan mata uang Islamic Dinar disetarakan dengan kurs *Special Drawing Right* IMF pada tanggal 31 Desember 2023.

Sedangkan Beban selisih kurs yang belum terealisasi sebesar Rp242.503.123.080 berasal dari penurunan nilai investasi pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI). Selain itu, terdapat kenaikan nilai utang jangka panjang Pemerintah pada LKI sebesar Rp106.751.103 yang diakibatkan oleh adanya perubahan nilai tukar. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

No	LKI	31 Desember 2022	31 Desember 2023	Beban Selisih Kurs
1	*Common Fund for Commodities* (CFC)	3.711.195.158	3.817.946.261	(106.751.103)
	Total	3.711.195.158	3.817.946.261	**(106.751.103)**

3. BA 999.04

Sedangkan Surplus (Defisit) Selisih Kurs Belum Terealisasi pada BUN Pengelola Belanja Pemberian Pinjaman (BA 999.04) pada Tahun 2023 adalah defisit sebesar Rp58.082.961.250 dan pada tahun 2022 surplus Rp653.556.837.624. Terdapat penurunan surplus (defisit) selisih kurs belum terealisasi sebesar Rp711.639.798.874 atau 108,89% jika dibandingkan dengan Tahun 2022. Penurunan Surplus/(Defisit) Selisih Kurs Belum Terealisasi disebabkan nilai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi lebih kecil daripada beban kerugian selisih kurs belum terealisasi. Nilai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi berasal dari jumlah selisih kurs akibat nilai kurs pada saat tanggal dilakukannya pembayaran kembali oleh debitur lebih besar dari pada kurs saat pelaporan. Sedangkan untuk beban kerugian selisih kurs belum terealisasi berlaku sebaliknya. Pendapatan dan beban selisih kurs belum terealisasi pada BUN Pengelola Belanja Pemberian Pinjaman dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi (491111)	4.368.565.140.634	3.567.071.695.937

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
2	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi (596211)	4.426.648.101.884	2.913.514.858.313
Jumlah Suprlus (Defisit)		**(58.082.961.250)**	**653.556.837.624**

4. BA 999.08

Surplus (Defisit) Selisih Kurs Belum Terealisasi pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain (999.08) pada Tahun 2023 dan 2022 adalah pada tahun 2023 surplus sebesar Rp33.667.650 dan pada tahun 2022 defisit sebesar Rp289.145.700. Defisit dari Selisih Kurs Belum Terealisasi pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp322.813.350 atau naik 11,64% bila dibandingkan dengan tahun 2022. Surplus Selisih Kurs Belum Terealisasi pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain (999.08) pada Tahun 2023 merupakan pendapatan selisih kurs belum terealisasi yan terdapat pada Setjen Kementerian Keuangan atas satker Pengelola Dana ICSID dengan menggunakan kurs penutup BI Rp15.439/USD. Rincian Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain Tahun 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	33.667.650	-
2	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	-	289.145.700
Jumlah Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi		**33.667.650**	**(289.145.700)**

5. BA 999.99

Selanjutnya Surplus (Defisit) dari Selisih Kurs Belum Terealisasi pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar defisit Rp1.164.519.342.912 dan surplus Rp8.754.000.470.752. Surplus (Defisit) dari Selisih Kurs Sebelum Realisasi pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp10.077.928.271.191 atau turun 115,12% bila dibandingkan dengan tahun 2022. Surplus dari Selisih Kurs Belum Terealisasi terdiri dari Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi sebesar Rp2.550.461.937.860 yang merupakan Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D dan Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi sebesar Rp3.874.389.738.299 merupakan Beban Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D dan Exotic Currency. Pendapatan dan Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi dirinci sebagai berikut:

No	Uraian		TA 2023
1	**Satker Pengelola Suspen Penerimaan**		**(95.484.605.873)**
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	95.484.605.873	
2	**Satker Pengelola BLBI**		**(115.813.516.515)**
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	115.813.516.515	
3	**Satker Pengelola Kas Negara**		**(434.055.995.816)**
	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	1.487.735.127.155	
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	1.921.791.122.971	
4	**Satker Pengelola Migas**		**90.301.826.456**
	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	1.260.903.938.111	
	Beban kerugian selisih kurs belum terealisasi	1.170.602.111.655	

No	Uraian		TA 2023
5	**Satker Pengelola KKKS PBMN**		**(114.197.439)**
	Beban kerugian selisih kurs belum terealisasi	114.197.439	
6	**Satker Pengelola KKKS BPMA**		**(27.869.144.538)**
	Beban kerugian selisih kurs belum terealisasi	27.869.144.538	
7	**Satker Pengelola TK KPPN KPH**		**(286.845)**
	Pendapatan seslisih kurs belum terealisasi	108.499.848.351	
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	108.500.135.196	
8	**Satker Badan Kebijakan Fiskal**		**865.899.066**
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	969.428.481	
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	103.529.415	
9	**Satker Pengelola Transaksi Khusus KPPN Jakarta I**		**(15.470.328)**
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	8.051.756	
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	23.522.084	
9	**Satker Pengelola Transaksi Khusus KPPN Jakarta II**		**6**
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	6	
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	-	
10	**Satker Pengelola Transaksi Khusus KPPN Jakarta III**		**1.284.591**
	Pendapatan kerugian selisih kurs belum terealisasi	2.775.354	
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	1.490.763	
11	**Satker Pengelola Transaksi Khusus KPPN Jakarta IV**		**1**
	Pendapatan selisih kurs belum terealisasi	754.327.001	
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	754.327.000	
12	**Satker Pengelola Transaksi Khusus KPPN Jakarta V**		**7**
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	9	
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	2	
13	**Satker Pengelola Transaksi Khusus KPPN Jakarta VI**		**(40.870)**
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	5.234	
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	46.104	
14	**Satker Pengelola Transaksi Khusus KPPN Jakarta VI**		**-**
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	-	
15	**Satker Pengelola Transaksi Khusus SKK Migas**		**(535.272.661.212)**
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	535.272.661.212	
16	**Satker Pengelola Transaksi Khusus Supersemar**		**(47.062.433.591)**
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	47.062.433.591	
Jumlah			**(1.164.519.342.900)**

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp33.498.506.863.342 apabila dirinci

berdasarkan Bagian Anggaran BUN adalah sebagai berikut:

BA	Uraian	TA 2023	TA 2022
999.01	Pengelola Utang	(19.496.546)	3.239.719.886.778
999.02	Pengelola Hibah	-	171.767.554.842
999.03	Pengelola Investasi Pemerintah	169.063.304.338	15.440.581.930
999.04	Pengelola Pemberian Pinjaman	6	2
999.05	Pengelolaan Transfer ke Daerah	335.480.385.568	116.753.541.918
999.07	Pengelola Belanja Subsidi	19.375.748.690	553.455.768.731
999.08	Pengelola Belanja Lain-Lain	34.714.662.944	343.580.616.047
999.99	Pengelola Belanja Transaksi Khusus	32.939.892.258.342	21.353.312.791.303
Jumlah		**33.498.506.863.342**	**25.794.030.741.551**

1. BA 999.01

Jumlah Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BA BUN Pengelola Utang (999.01) sebesar defisit Rp19.496.546 yang diperoleh dari pengurangan antara Pendapatan penyesuaian Lainnya sebesar Rp0 dan Beban Lain-Lain sebesar Rp19.496.546.

Rincian Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp19.496.546 pada BUN Pengelola Utang (999.01) tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Pendapatan Penyesuaian Lainnya	-	3.239.719.886.778
2	Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	19.496.546	-
Jumlah Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya		**19.496.546**	**3.239.719.886.778**

2. BA 999.03

Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 pada BA BUN Pengelola Investasi Pemerintah (999.03) adalah sebesar Rp169.063.304.338. Surplus ini berasal dari Pendapatan Penyesuaian Investasi Nilai Investasi Hasil Konfirmasi sebesar Rp169.063.304.338.

Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya merupakan Pendapatan penyesuaian nilai investasi hasil konfirmasi pada LKI UAKPA BKF (984393). Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya pada Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp169.063.304.338 dan Rp15.442.912.628. Pengakuan pendapatan merupakan pengakuan selisih lebih antara nilai rupiah dalam konfirmasi LKI dengan nilai rupiah tercatat dalam pembukuan pemerintah. Pengakuan pendapatan tersebut merupakan selisih lebih hasil konfirmasi yang berasal dari IBRD, IDA, dan IsDB.

3. BA 999.04

Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BA BUN Pengelola Pemberian Pinjaman (999.04) Tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar surplus Rp6 dan defisit Rp2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan Pembulatan (597111) berasal dari akumulasi pembulatan ke atas dan pembulatan ke bawah.

4. BA 999.05

Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BUN Pengelola Transfer ke Daerah (999.05) pada Tahun 2023 sebesar Rp335.480.385.568. Bila dibandingkan dengan tahun 2022 Surplus Kegiatan Non Operasional pada BUN Pengelola Transfer ke Daerah mengalami kenaikan sebesar

Rp218.726.843.650 atau naik 187,34%. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp335.480.385.568, yang berasal dari:

Satker Penyalur DTK – DAK Non Fisik

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp2.336.958.143.922,00 dan Rp0,00 (Nihil). Kenaikan sebesar 100% tersebut antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

a. dilakukan jurnal balik atas penyelesaian piutang DAK Non Fisik TA 2022 sebesar Rp1.823.523.256.640,00
b. penyelesaian piutang DAK Non Fisik TA 2022 sebesar Rp2.985.140.132.140,00
c. terdapat pengakuan beban DAK Non Fisik Audited TA 2022 sebesar Rp279.114.673.597,00. Beban ini diakui karena penyajian di LKTD Audited TA 2022 diketahuii netto.

Satker Penyalur DDIOKK – Dana Desa

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp39.059.931.233,00 dan Rp0,00 (Nihil) Apabila dibandingkan, pendapatan tersebut mengalami penurunan sebesar kenaikan sebesar 100%. Hal ini disebabkan oleh adanya pengakuan beban Dana Desa TA 2022 dikarenakan penyajiannya yang dilakukan secara netto pada LKTD Audited 2022

5. BA 999.07

Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BUN Pengelola Belanja Subsidi (999.07) pada Tahun 2023 sebesar Rp19.375.748.690. Surplus Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2023 pada BUN Pengelola Belanja Subsidi mengalami penurunan sebesar Rp534.080.020.041 atau turun 96,50% bila dibandingkan dengan tahun 2022. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional pada Belanja Subsidi untuk Periode 31 Desember 2023 sebesar Rp19.375.748.690 terdiri dari Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp16.061.626.370 pada Kementerian Keuangan, kemudian di Kementerian PUPR sebesar Rp2.201.775.119 serta sebesar Rp1.112.347.201 lagi pada Kementerian KUKM.

6. BA 999.08

Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain (999.08) pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp34.714.662.944 dan Rp343.580.616.047. Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp308.865.953.103 atau 89,90% bila dibandingkan dengan tahun 2022. Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional BUN Pengelola Belanja Lain-lain berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Lain-Lain Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp34.714.662.944

7. BA 999.99

Selanjutnya Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BUN Pengelola Transaksi Khusus pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp32.939.892.258.342 dan Rp21.353.312.791.303. Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BUN Pengelola Transaksi Khusus pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp11.586.579.467.039 atau naik 54,26% bila dibandingkan dengan tahun 2022. Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp41.534.498.839.125 dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp8.594.606.580.783.

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (999.99) dirinci sebagai berikut:

a. Pada UAKPA BUN TK DJPb satker 987361 Saldo Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah Rp201.721.116.991 yang merupakan Penerimaan Kembali Belanja Kontribusi Sosial TAYL (425921) sebesar Rp199.103.667.209 dan Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (425912) sebesar Rp2.617.449.782.

b. Pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN Hulu Migas/KKKS pada BPMA, Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 adalah Rp124.285.453.278 dari Pengadaan Aset MP pada KKKS Medco E&P Malaka.

c. Pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN Hulu Migas/KKKS pada SKK Migas, Saldo Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp40.680.166.914.851 yang berasal dari penambahan nilai Aset Lainnya berupa HBM, HBI dan Tanah sebagai berikut:

   1) HBM sebesar Rp23.823.116.204.064,70

   2) HBI sebesar Rp2.496.605.251,55

   3) MP sebesar Rp16.854.554.105.533,30

d. Pada UAKPA TK Aset Lain-Lain, Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp1.168.456.963,00 yang merupakan nilai dari penerimaan barang gratifikasi yang diserahkan oleh KPK kepada DJKN pada tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor dan Tanggal BAST	Jumlah Barang	Nilai Barang (Rp)
1	BAST-01/GTF.02.00/13/01/2023 tanggal 17 Januari 2023	854	685.405.563
2	BAST-02/GTF.02.00/13/01/2023 tanggal 22 Juni 202	506	301.065.229
3	BAST-03/GTF.02.00/13/07/2023 tanggal 26 Juli 2023	104	50.350.000
4	BAST-04/GTF.02.00/13/08/2023 tanggal 3 Agustus 2023	3	930.000
5	BAST-05/GTF.02.00/13/08/2023 tanggal 11 Agustus 2023	11	7.000.000
6	BAST-06/GTF.02.00/13/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023	4	3.400.000
7	BAST-07/GTF.02.00/13/09/2023 tanggal 1 September 2023	5	2.100.000
8	BAST-08/GTF.02.00/13/09/2023 tanggal 27 September 2023	1	300.000
9	BAST-09/GTF.02.00/13/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023	295	113.606.171
10	BAST-10/GTF.02.00/13/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023	1	450.000
11	BAST-11/GTF.02.00/13/10/2023 tanggal 16 November 2023	1	3.850.000
	Jumlah	1.785	1.168.456.963

Pendapatan perolehan aset lainnya sebesar Rp1.168.456.963 merupakan nilai barang gratifikasi yang diterima dari KPK yang mulai tahun 2023 dicatat sebagai Pendapatan Perolehan Aset Lainnya.

e. Pada UAKPA BUN BMN PKP2B, Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya untuk

periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp527.156.897.042 dengan rincian sebagai berikut:

1) Pembelian dan Kapitalisasi BMN pada PT Berau Coal sebesar Rp130.678.818.685
2) Penambahan BMN Non Tanah PT Berau Coal sebesar Rp768.059.000,00 sesuai Laporan Penilaian LAP-0156/1/PRO-1/KNL.1304/01.01.00/2023 24 November 2023
3) Penambahan BMN Tanah PT Berau Coal sebesar Rp303.964.734.000 sesuai Laporan Penilaian LAP-0157/1/PRO-01/KNL.1304/01.01.00/2023 s.d LAP-0502/1/PRO.01/KNL. 1304/01.01.00/2023 18 Desember 2023
4) Penambahan BMN Non Tanah PT KJA sebesar Rp6.774.285.000 sesuai Laporan Penilaian LAP-0331/1/PRO-01/KNL.0702/01.01.00/2023 tanggal 2 Oktober 2023, LAP-0106/1/PRO-01/KNL.1301/01.01.00/2023 sd. LAP-0107/1/PRO-01/KNL.1301/01.01.00/2023 6 November 2023
5) Penambahan BMN Non Tanah PT Arutmin Indonesia sebesar Rp17.886.017.000,00 sesuai Laporan Penilaian LAP-02211/1/PRO-01/KNL.0702/01.01.00/2023 28 Juli 2023, LAP-0270/1/PRO-01/KNL.1304/01.01.00/2023 sd. LAP-0276/1/PRO-01/KNL.1304/01.01.00/2023 10 Agustus 2023
6) Penambahan BMN yang timbul dari pekerjaan yang dimulai pada masa PKP2B dan diselesaikan pada masa IUPK 2023 PT KPC serta penambahan BMN Tanah pada PT KPC sebesar Rp33.344.754.855.
7) Penambahan BMN Tanah PT KPC sebesar Rp7.021.260.000 sesuai Laporan Penilaian LAP-0125/1/PRO-01/KNL.1304/01.01.00/2023 14 September 2023
8) Penambahan BMN Tanah PT KPC sebesar Rp3.082.382.000 sesuai Laporan Penilaian LAP-0148/1/PRO-01/KNL.1304/01.01.00/2023 s.d. LAP-0151/1/PRO-01/KNL.1304/01.01. 00/2023 18 Desember 2023
9) Penambahan BMN Non Tanah PT KPC sebesar Rp23.466.970.000 sesuai Laporan Penilaian LAP-0124/1/PRO-01/KNL.1304/01.01.00/2023 14 September 2023
10) Penjualan sisa stock batubara (yang tidak dicatat pada UAKPA BUN PKP2B) pada saat PT Tanito Harum dicabut izin IUPK Operasi Produksinya oleh pemerintah c.q MESDM sebesar PT Tanito 169.616.502 sesuai Berita Acara Rekonsiliasi Sewa Operasi BMN PKP2B Per Triwulan I Tahun 2023 Nomor BA-2/KN.44/2023 tanggal 17 April 2023.

E.2.4. Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah nihil.

Catatan Penting Lainnya

BA 999.01

Kontribusi yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah, diakui serta dicatat oleh Pemerintah sebagai Pendapatan-LO. Bank Indonesia memberikan kontribusi dalam skema burden

sharing termasuk yang terjadi saat tanggal penerimaan kontribusi BI terakhir sampai dengan tanggal pelaporan dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penerimaan	Kontribusi BI	Beban Pemerintah	Total
A. *Public Goods*				
1	Penyesuaian Akrual 2022	(2.142.456.970.000)	-	(2.142.456.970.000)
2	Januari	900.596.250.000	-	900.596.250.000
3	Februari	1.792.186.000.000	-	1.792.186.000.000
4	Maret	3.100.967.700.000	-	3.100.967.700.000
5	April	1.080.898.840.000	-	1.080.898.840.000
6	Mei	2.270.632.740.000	-	2.270.632.740.000
7	Juni	1.596.617.460.000	-	1.596.617.460.000
8	Juli	2.389.736.300.000	-	2.389.736.300.000
9	Agustus	2.248.414.520.000	-	2.248.414.520.000
10	September	2.858.143.800.000	-	2.858.143.800.000
11	Oktober	1.063.634.100.000	-	1.063.634.100.000
12	November	2.210.271.320.000	-	2.210.271.320.000
13	Desember	2.844.745.930.000	-	2.844.745.930.000
14	Penyesuaian Akrual 2023	2.436.044.010.000	-	2.436.044.010.000
SUBTOTAL PG		**24.650.432.000.000**	**-**	**24.650.432.000.000**
B. *Non Public Goods*				
1	Penyesuaian Akrual 2022	(50.498.383.561)	(169.241.650.028)	(219.740.033.589)
2	Juni	540.629.753.425	4.466.588.153.425	5.007.217.906.850
3	Desember	446.619.175.471	4.602.937.677.953	5.049.556.853.424
3	Penyesuaian Akrual 2023	24.488.397.350	402.442.638.510	426.931.035.860
SUBTOTAL NPG		**961.238.942.685**	**9.302.726.819.860**	**10.263.965.762.545**
C. Cluster A				
1	Penyesuaian Akrual 2022	(625.992.334.620)	-	(625.992.334.620)
2	Januari	276.095.493.750	-	276.095.493.750
3	Februari	133.224.244.740	-	133.224.244.740
4	Maret	1.024.746.069.180	-	1.024.746.069.180
5	April	342.161.591.700	-	342.161.591.700
6	Mei	139.828.734.000	-	139.828.734.000
7	Juni	921.910.000.000	-	921.910.000.000
8	Juli	488.079.393.230	-	488.079.393.230
9	Agustus	137.709.317.340	-	137.709.317.340
10	September	1.051.215.239.580	-	1.051.215.239.580
11	Oktober	336.825.567.900	-	336.825.567.900
12	November	135.352.455.660	-	135.352.455.660
13	Desember	1.035.454.514.150	-	1.035.454.514.150
14	Penyesuaian Akrual 2023	705.612.371.730	-	705.612.371.730
SUBTOTAL CLUSTER A		**6.102.222.658.340**	**-**	**-**
TOTAL PG, NPG DAN CLUSTER A		**31.713.893.601.025**	**9.302.726.819.860**	**41.016.620.420.885**

BA 999.08

Perhitungan Dana Kompensasi Listrik kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) TA 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No.159/PMK.02/2022 dan Peraturan Menteri ESDM No.28 Tahun 2016 beserta perubahannya yang berlaku di tahun 2023, belum mengacu pada Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik Riil tahun 2023.

Apabila Perhitungan Dana Kompensasi Listrik mengacu pada Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik Riil tahun 2023, maka diperoleh nilai dana kompensasi tahun 2023 sebesar Rp65.679.658.957.291. Sedangkan dengan dihitung menggunakan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik APBN maka diperoleh nilai dana kompensasi tahun 2023 sebesar Rp74.171.945.899.119. Nilai Rp74.171.945.899.119 merupakan nilai tagihan PT PLN (Persero) Kepada Direktur PNBP SDA KND selaku KPA Dana Kompensasi yang kemudian ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui surat nomor S-234/MK.05/2024 tanggal 13 Maret 2024 hal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT PLN (Persero) akibat Penetapan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2023 sebesar Rp74.014.279.267.102.

Berkenaan dengan hal tersebut, saat ini Pemerintah (dhi. Kementerian ESDM) tengah menyusun kajian mengenai formula perhitungan dana kompensasi listrik, yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar perhitungan dana kompensasi listrik.

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi Pusat (UAPBUN-AP) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan bertindak sebagai konsolidator Laporan Arus Kas Konsolidasian BUN yang terdiri dari Laporan Arus Kas Laporan Keuangan Koordinator Kuasa BUN Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Laporan Arus Kas Laporan Keuangan Kuasa BUN Pusat (UAKBUN-P) serta Laporan Arus Kas Laporan Keuangan Kuasa BUN Daerah KPPN Khusus.

Konsolidasi Laporan Arus Kas Konsolidasian BUN dilakukan atas seluruh angka realisasi bersih (netto) penerimaan dan pengeluaran kas yang dibukukan oleh KPPN dan Dit PKN selaku Kuasa BUN, baik berasal dari transaksi BA BUN maupun transaksi BA Kementerian Negara/Lembaga.

F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS

F.1.1. Saldo Awal Kas

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp536.443.156.881.227 yang merupakan saldo akhir kas per 31 Desember 2022. Apabila dibandingkan dengan Saldo Awal Kas per 1 Januari 2022 sebesar Rp374.272.452.880.577, maka mengalami kenaikan sebesar Rp162.170.704.000.650. Rincian Saldo Awal Kas per 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	1 Januari 2023	1 Januari 2022
Kas di BUN Pusat	394.096.461.571.443	253.683.550.805.313
Kas di KPPN	2.774.997.342.454	721.442.531.795
Kas pada BLU	78.971.222.880.967	81.993.516.161.352
Kas di K/L dari Hibah	2.895.708.729.836	1.745.056.899.938
Kas Escrow	52.253.149.048.677	29.926.032.453.218
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	5.451.617.307.850	6.202.854.028.961
Saldo Awal Kas	**536.443.156.881.227**	**374.272.452.880.577**

F.1.2. Perubahan Kas

Kenaikan (Penurunan) Kas dari berbagai aktivitas Pemerintah pada TA 2023 dan TA 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(34.793.236.369.070)	(220.433.644.891.532)	84,22
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(391.624.901.747.838)	(347.174.022.486.045)	(12,80)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	445.794.317.054.009	698.166.134.429.528	(36,15)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	88.761.873.212.786	20.042.387.123.266	342,87
Koreksi:			
Akumulasi Koreksi Pembukuan	(3.566.936.515.283)	11.569.849.825.433	(130,83)
Penggunaan SAL	(35.000.000.000.000)	0	(100,00)
Kenaikan (Penurunan) Kas Setelah Penyesuaian	**69.571.115.634.604**	**162.170.704.000.650**	**(57,10)**

I. Akumulasi Koreksi Pembukuan sebesar minus Rp3.566.936.515.283 terdiri dari:

No	KPPN	Jumlah (Rp)
1	Koreksi SILPA	1.496.864.847.086
2	Koreksi Selisih Kurs	(529.364.838.247)
3	Koreksi Pembukuan	(4.534.436.524.122)
Jumlah Akumulasi Pembukuan		**(3.566.936.515.283)**

Penjelasan Akumulasi Koreksi Pembukuan sebesar minus Rp3.566.936.515.283 terdiri dari:

1. Koreksi SILPA sebesar Rp1.496.864.847.086 terdiri dari:
   a. Pengembalian atas Pendapatan Tahun Anggaran yang Lalu yang berasal dari akun:

No	KPPN	Jumlah (Rp)
1	Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu (311212)	(105.394.184.105)
2	Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung (311911)	(1.690.093.123)
Jumlah Pengembalian Pendapatan TAYL		**(107.084.277.228)**

   b. Penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA (311211) sebesar Rp1.603.949.124.314

2. Koreksi Selisih Kurs sebesar minus Rp529.364.838.247 merupakan saldo selisih kurs belum terealisasi setelah perhitungan selisih kurs terealisasi dan penyesuaian selisih kurs yang selanjutnya disesuaikan sebagai pendapatan/kerugian selisih kurs yang belum terealisasi dari proses revaluasi yaitu pendapatan atas keuntungan selisih kurs yang belum terealisasi sebesar Rp1.596.970.205.995 dan kerugian selisih kurs yang belum terealisasi sebesar minus Rp2.126.335.044.242.
3. Penjelasan Koreksi Pembukuan sebesar minus Rp4.534.436.524.122 terdiri dari koreksi Kas Hibah, koreksi Kas BLU dan koreksi kas di BUN dengan rincian berikut:
   a. Koreksi Kas Hibah sebesar minus Rp27.019.436.853 merupakan koreksi atas saldo hibah yang sudah disahkan pada tahun 2023 di Kuasa BUN (KPPN). Koreksi atas saldo Kas Hibah ini dikarenakan adanya pengesahan hibah luar negeri TAYL dengan nilai neto sebesar minus Rp2.839.196.445, revaluasi saldo kas hibah sebesar Rp25.765.188.423, reklasifikasi kas hibah ke kas BLU sebesar Rp93.447.775, serta penyesuaian kas hibah akibat kesalahan pembukukan pendapatan hibah sebesar Rp3.999.997.100. Rincian koreksi Kas Hibah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN Gorontalo (050)	(3.999.997.100)
2	KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah (140)	(23.019.439.753)
Jumlah Koreksi Kas Hibah		**(27.019.436.853)**

b. Koreksi Kas BLU sebesar minus Rp4.264.411.251.718 merupakan koreksi atas saldo Kas BLU yang sudah disahkan yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN) karena adanya perekaman saldo awal BLU baru pada tahun 2023, penyesuaian saldo Kas BLU akibat likuidasi, serta penyesuaian saldo kas akibat perubahan menjadi PTNBH (Perguruan Tinggi Berbadan Hukum) serta koreksi kas BLU dalam rangka reklasifikasi investasi jangka pendek ke investasi jangka panjang BPDPKS. Rincian koreksi Kas BLU pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	KPPN	Jumlah (Rp)
1	BANDA ACEH (001)	(76.588.465.871)
2	PADANG SIDEMPUAN (006)	418.025.000
3	PALEMBANG (014)	30.699.248.043
4	JAKARTA II (019)	(1.237.533.101.940)
5	BANDUNG I (022)	-
6	SEMARANG I (026)	(432.397.523.273)
7	PURWOKERTO (029)	4.314.507.894
8	YOGYAKARTA (030)	(139.720.172.187)
9	SURABAYA I (031)	(123.938.809.876)
10	DENPASAR (037)	(298.090.615)
11	PONTIANAK (042)	(998.453.055)
12	PALU (051)	217.724.588
13	KARAWANG (086)	2.352.393.404
14	TANGERANG (127)	(2.342.552.346.684)
15	JEMBER (131)	32.923.674.627
16	MAKASSAR II (136)	-
17	BATAM (137)	18.690.138.227
Jumlah Koreksi Kas BLU		**(4.264.411.251.718)**

Koreksi Kas BLU paling besar terdapat pada KPPN Tangerang, koreksi tersebut merupakan jurnal penyesuaian pada satker Universitas Terbuka (677531) yang berubah status menjadi PTN-BH. Sedangkan koreksi terbesar kedua berada pada KPPN Jakarta II, koreksi tersebut merupakan jurnal penyesuaian saldo kas BLU pada Satker (409999) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dalam rangka reklasifikasi Kas pada BLU ke investasi jangka panjang.

Koreksi Kas BLU pada KPPN Bandung merupakan jurnal penyesuaian saldo kas BLU antar satker dalam satu lingkup wilayah kerja KPPN yang sama, yaitu dari satker BLU BKPM (415381) ke satker Rumah Sakit Paru DR.H.A. Rotinsulu (415481) sebesar Rp9.670.589.219, sehingga arus kas BLU secara netto pada KPPN Bandung I sebesar Rp0.

Koreksi Kas BLU pada KPPN Makassar II merupakan jurnal penyesuaian saldo kas BLU antar satker dalam satu lingkup wilayah kerja KPPN yang sama, yaitu dari satker Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjudin Chalid Makassar (258462) ke satker Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Sulawesi Selatan (415401) sebesar Rp1.520.896.173, sehingga arus kas BLU secara netto pada KPPN Makassar II sebesar Rp0.

c. Koreksi Kas BUN sebesar minus Rp243.005.835.551 merupakan pengeluaran kas dari Rekening Khusus dalam rangka pengembalian (refund) penerimaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri TAYL yang menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2017 tentang Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri tidak dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan melainkan sebagai koreksi kas.

II. Penggunaan Dana SAL pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebesar minus Rp35.000.000.000.000 dan Rp0. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN TA 2023, pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, penerbitan SBN, dan/atau pemanfaatan saldo kas BLU sebagai tambahan pembiayaan. Kemudian pada Pasal 8 PMK Nomor 147/PMK.05/2021 tentang Pengolaan Saldo Anggaran Lebih dinyatakan bahwa SAL digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kas temporer, pemenuhan pembiayaan anggaran dan/atau stabilisasi. Penggunaan SAL dilakukan dengan terlebih dahulu memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berikutnya. Penggunaan Dana SAL sebesar minus Rp35.000.000.000.000 merupakan Pembiayaan Lainnya dari APBN tahun 2023 yang seluruhnya bersumber dari Rek Lain BI SAL dalam rangka pemenuhan pembiayaan anggaran.

F.1.3. Saldo Akhir Kas dan Bank

Saldo Akhir Kas dan Bank pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp606.014.272.515.831 dan Rp536.443.156.881.227. Saldo Akhir Kas dan Bank pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp69.571.115.634.604 atau 12,97% dari TA 2022. Saldo Akhir Kas dan Bank merupakan kas Pemerintah Pusat yang tersedia dan dapat digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah tahun anggaran berikutnya. Adapun rincian Saldo Akhir Kas dan Bank pada TA 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Kas pada BLU	92.393.578.520.721	78.971.222.880.967	17,00
Kas di Kementerian/Lembaga dari Hibah	13.992.553.217.607	2.895.708.729.836	383,22
Rekening Kas di KPPN	5.128.787.424.755	2.774.997.342.454	84,82
Rekening Kas di BUN	342.835.699.040.576	394.096.461.571.443	(13,01)
Rekening Pemerintah Lainnya	3.507.746.680.531	5.451.617.307.850	(35,66)
Kas Rekening Escrow	148.155.907.631.641	52.253.149.048.677	183,53
Jumlah Saldo Akhir Kas	**606.014.272.515.831**	**536.443.156.881.227**	**12,97**

Sesuai PMK Nomor 147/PMK.05/2021 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih, Kas di Rekening Kas SAL telah dicatat sebagai bagian dari Rekening Kas BUN di BI. Perlakuan yang sama terhadap Kas di Rekening Khusus yang merupakan bagian dari Rekening Kas BUN di BI. Untuk Laporan Tahun 2023, transaksi keuangan pada Rekening Khusus telah dicatat sesuai Sistem Akuntansi Pusat dan dikonsolidasikan dalam Laporan Arus Kas ini.

Rincian Kas Bendahara Umum Negara (Kas BUN) terdiri dari:

1. Rekening Kas Umum Negara dalam Rupiah;
2. Rekening Kas Umum Negara dalam Valuta USD;
3. Rekening Kas Umum Negara dalam Valuta JPY;
4. Rekening Kas Umum Negara dalam Valuta Euro;
5. Rekening Penempatan dalam Rupiah;
6. Rekening Penempatan dalam Valuta USD;
7. Rekening Penempatan dalam Valuta JPY;
8. Rekening Penempatan dalam Valuta Euro;
9. Rekening Saldo Anggaran Lebih (SAL);
10. Rekening Khusus dalam Rupiah;
11. Rekening Khusus dalam Valuta AUD;
12. Rekening Khusus dalam Valuta EUR;
13. Rekening Khusus dalam Valuta JPY;
14. Rekening Khusus dalam Valuta USD;

15. RPKBUN P SPAN-Gaji;
16. RPKBUN P SPAN-Non Gaji Mandiri;
17. RPKBUN P SPAN-Non Gaji BTN;
18. RPKBUN P SPAN-Non Gaji BNI;
19. RPKBUN P SPAN-Non Gaji BRI;
20. RPKBUN P SPAN-Non Gaji BSI;
21. Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH;
22. Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Rupiah;
23. Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta USD;
24. Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Euro;
25. Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta JPY;

Rincian Rekening Pemerintah Lainnya terdiri dari:

1. Rekening Retur SPAN Non Gaji;
2. Rekening Retur Gaji;
3. Rekening Dana Investasi dalam Valuta IDR;
4. Rekening Dana Investasi dalam Valuta JPY;
5. Rekening Dana Investasi dalam Valuta AUD;
6. Rekening Dana Investasi dalam Valuta USD;
7. Rekening Dana Investasi dalam Valuta GBP;
8. Rekening Dana Investasi dalam Valuta Euro;
9. Rekening Pembangunan Daerah;
10. Rekening Depkeu k/ Hasil minyak perjanjian karya prodsharing;
11. Rekening Penerimaan Panas Bumi;
12. Rekening Dana Bergulir;
13. Rekening Kelolaan TDR;
14. Rekening Retur SBSN;
15. Rekening Menkeu untuk Penerimaan Hibah Educt Sector Support program ESSP;

Rincian Rekening Dana Dibatasi Penggunaannya terdiri dari:

1. Rekening Pembangunan Hutan;
2. Rekening Cadangan Dana Reboisasi;
3. Rekening Dana Cadangan Alutsista;
4. Rekening Menkeu Pengeluaran untuk SBN dalam Valuta IDR;
5. Rekening Menkeu Pengeluaran untuk SBN dalam Valuta USD;
6. Rekening Menkeu Pengeluaran untuk SBN dalam Valuta Euro;
7. Rekening Lain BI Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah;
8. Rekening Lain BI Pengelolaan Aset BPR;
9. Rekening Lain BI Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah;
10. Rekening Lain BI BUN untuk Obligasi dalam rangka Penjaminan
11. Rekening Stabilisasi SBN;
12. Rekening Lain BI Dana PFK;
13. Rekening Lain BI Investasi Pemerintah PEN;
14. Rekening Lain BI Investasi BUN;
15. Rekening Lain BI RIBUN Imbal Hasil;
16. Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda;
17. Rekening Lain BI Penampungan Akhir Tahun Anggaran.

F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS

Penjelasan atas Laporan Arus Kas BUN pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

F.2.1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar minus Rp34.793.236.369.070 dan minus Rp220.433.644.891.532. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp185.640.408.522.462 atau 84,22% dari TA 2022. Kenaikan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi pada TA 2023 terutama berasal dari kenaikan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah, Pajak Penghasilan, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, sementara itu terdapat penurunan yang didominasi oleh Belanja Lain-lain. Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah pada TA 2023. Adapun rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Arus Kas Masuk	2.783.382.716.269.797	2.635.258.772.087.072	5,62
Dikurangi Arus Kas Keluar	2.818.175.952.638.867	2.855.692.416.978.604	(1,31)
Arus Kas Bersih	**(34.793.236.369.070)**	**(220.433.644.891.532)**	**(84,22)**

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih pada TA 2023 sebesar minus Rp34.793.236.369.070 menunjukkan bahwa pendapatan operasional pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan operasional pemerintah. Lebih rendahnya arus kas masuk dibandingkan dengan arus kas keluar mengindikasikan rendahnya capaian realisasi penerimaan negara yang dipengaruhi oleh perkembangan kondisi perekonomian domestik maupun global serta tingginya belanja pemerintah seperti belanja pembayaran bunga utang.

F.2.1.1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.154.208.219.467.830 dan Rp2.034.552.436.470.075. Penerimaan Perpajakan pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp119.655.782.997.760 atau 5,88% dari TA 2022. Penerimaan Perpajakan terdiri dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar Rp2.089.718.285.003.417 dan Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp64.489.934.464.413. Penerimaan Perpajakan merupakan penerimaan Pemerintah yang dihimpun dari sektor perpajakan pada TA 2023 setelah dikurangi pengembalian pendapatan perpajakan. Adapun rincian Penerimaan Perpajakan adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Pajak Dalam Negeri			
Pajak Penghasilan (PPh)	1.061.234.020.639.596	998.213.803.714.799	6,31
Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN&PNBM)	763.632.668.212.526	687.609.450.256.247	11,06
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	33.270.661.547.958	23.264.663.527.700	43,01
Cukai	221.851.144.542.725	226.880.753.312.323	(2,22)
Pajak Lainnya	9.729.790.060.612	7.686.100.141.265	26,59
Jumlah Penerimaan Pajak Dalam Negeri	**2.089.718.285.003.417**	**1.943.654.770.952.334**	**7,51**
Pajak Perdagangan Internasional			
Bea Masuk	50.891.762.896.870	51.077.726.593.610	(0,36)
Bea Keluar	13.598.171.567.543	39.819.938.924.131	(65,85)
Jumlah Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional	**64.489.934.464.413**	**90.897.665.517.741**	**(29,05)**
Penerimaan Perpajakan	**2.154.208.219.467.830**	**2.034.552.436.470.075**	**5,88**

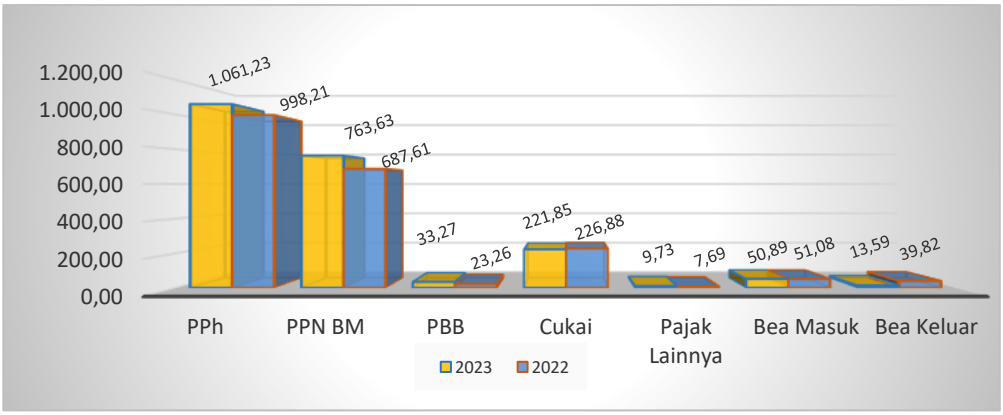

F.2.1.1.1. Pajak Penghasilan

Penerimaan Pajak Penghasilan pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.061.234.020.639.596 dan Rp998.213.803.714.799. Pajak Penghasilan pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp63.020.216.924.797 atau 6,31% dari TA 2022. Adapun rincian Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
PPh Migas			
PPh Minyak Bumi	22.904.493.665.260	29.599.710.570.513	(22,62)
PPh Gas Alam	45.867.105.436.853	48.239.737.523.971	(4,92)
PPh Migas Lainnya	1.572.224.727	3.108.450.219	(49,42)
Jumlah PPh Migas	**68.773.171.326.840**	**77.842.556.544.703**	**(11,65)**
PPh Non Migas			
PPh Pasal 21	200.849.556.208.059	172.271.504.252.153	16,59
PPh Pasal 22	33.960.305.154.489	33.047.948.496.551	2,76
PPh Pasal 22 Import	69.528.072.968.512	74.199.825.147.250	(6,30)
PPh Pasal 23	58.168.982.689.674	48.703.438.992.715	19,44
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	12.263.329.558.127	11.577.509.255.097	5,92
PPh Pasal 25/29 Badan	406.296.468.651.423	337.592.447.567.747	20,35
PPh Pasal 26	76.957.876.931.724	65.293.293.607.543	17,86
PPh Final	125.092.090.364.487	166.183.983.224.667	(24,73)
PPh Non Migas Lainnya	152.697.346.952	129.343.789.152	18,06
Jumlah PPh Non Migas	**983.269.379.873.447**	**908.999.294.332.875**	**8,17**
Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah	9.191.469.439.309	11.371.952.837.221	(19,17)
Jumlah Pajak Penghasilan	**1.061.234.020.639.596**	**998.213.803.714.799**	**6,31**

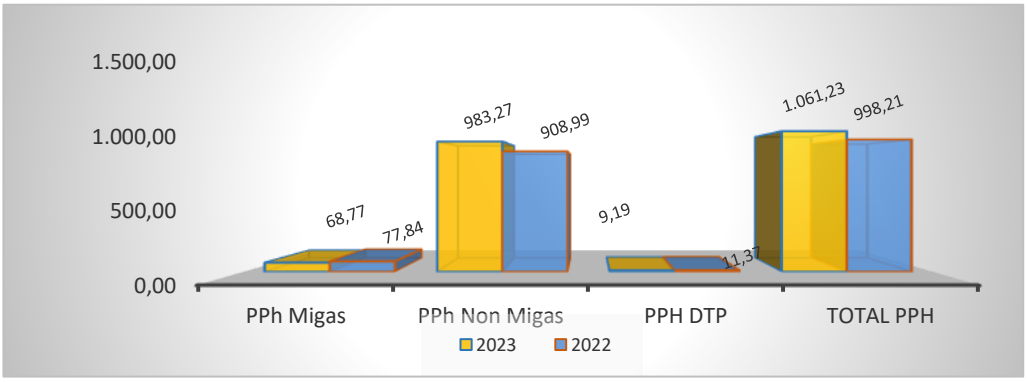

F.2.1.1.2. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM) pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp763.632.668.212.526 dan Rp687.609.450.256.247. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM) pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp76.023.217.956.279 atau 11,06% dari TA 2022. Adapun rincian Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM) adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
PPN dan PPnBM Dalam Negeri	490.565.774.591.166	401.484.611.754.430	22,19
PPN dan PPnBM Impor	262.961.581.020.286	275.593.721.527.266	(4,58)
PPN dan PPnBM Lainnya	8.011.588.696.807	6.160.421.866.226	30,05
PPN Ditanggung Pemerintah	2.093.723.904.267	4.370.695.108.325	(52,10)
Jumlah PPN dan PPnBM	**763.632.668.212.526**	**687.609.450.256.247**	**11,06**

F.2.1.1.3. Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp33.270.661.547.958 dan Rp23.264.663.527.700. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp10.005.998.020.258 atau 43,01% dari TA 2022. Adapun rincian Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
PBB Perkebunan	3.241.035.767.076	2.979.222.049.742	8,79
PBB Kehutanan	627.259.722.024	774.422.597.198	(19,00)
PBB Pertambangan	11.492.310.087.449	5.292.431.739.792	117,15
PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	17.192.838.858.870	13.711.084.449.060	25,39
PBB Pertambangan Panas Bumi	618.223.603.408	490.714.138.086	25,98
PBB Lainnya	98.993.509.131	16.788.553.822	489,65
Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan	**33.270.661.547.958**	**23.264.663.527.700**	**43,01**

F.2.1.1.4. Cukai

Cukai pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp221.851.144.542.725 dan Rp226.880.753.312.323. Cukai pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp5.029.608.769.598 atau minus 2,22% dari TA 2022. Adapun rincian Cukai adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Cukai Hasil Tembakau	213.497.773.071.725	218.621.484.007.231	(2,34)
Cukai *Ethyl* Alkohol	127.918.170.000	127.411.014.195	0,40
Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	8.103.897.479.000	8.067.276.626.590	0,45
Denda Administrasi Cukai	104.242.719.000	43.076.467.478	141,99
Cukai Lainnya	17.313.103.000	21.505.196.829	(19,49)
Jumlah Cukai	**221.851.144.542.725**	**226.880.753.312.323**	**(2,22)**

F.2.1.1.5. Pajak Lainnya

Pajak Lainnya pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp9.729.790.060.612 dan Rp7.686.100.141.265. Pajak Lainnya pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.043.689.919.347 atau 26,59% dari TA 2022. Adapun rincian Pajak Lainnya adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Pendapatan Pajak Lainnya			
Pendapatan Bea Materai	1.223.862.796.089	1.070.263.327.848	14,35
Pendapatan dari Penjualan Bea Materai	5.470.840.719.647	5.661.404.285.336	(3,37)
Pendapatan PPN Batubara	196.395.808.289	417.224.046.910	(52,93)
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	3.812.341.830	3.659.888.938	4,17
Jumlah Pendapatan Pajak Lainnya	**6.894.911.665.855**	**7.152.551.549.032**	**(3,60)**

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Pendapatan Bunga Penagihan Pajak			
Bunga Penagihan PPh	2.260.155.446.639	124.551.321.166	1.714,64
Bunga Penagihan PPN	576.930.315.430	408.996.871.067	41,06
Bunga Penagihan PPnBM	-2.949.314.751	400.000	(737.428,69)
Jumlah Bunga Penagihan Pajak	**2.834.136.447.318**	**533.548.592.233**	**431,19**
Pendapatan Denda Penagihan			
Denda Penagihan PPh	729.772.787	0	100,00
Denda Penagihan PPN	12.174.652	0	100,00
Jumlah Denda Penagihan	**741.947.439**	**0**	
Jumlah Pajak Lainnya (Netto)	**9.729.790.060.612**	**7.686.100.141.265**	**26,59**

F.2.1.1.6. Pajak Perdagangan Internasional

Pajak Perdagangan Internasional pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp64.489.934.464.413 dan Rp90.897.665.517.741. Pajak Perdagangan Internasional pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp26.407.731.053.328 atau sebesar minus 29,05% dari TA 2022. Adapun rincian Pajak Perdagangan Internasional adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Bea Masuk:			
Bea Masuk	47.031.645.101.860	45.608.785.765.341	3,12
Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)	5.321.000	-	
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	991.256.259.179	749.777.238.893	32,21
Bea Masuk dalam Rangka KITE	402.746.814.511	1.087.732.642.874	(62,97)
Pendapatan Pabean Lainnya	7.792.099.320	9.504.407.160	(18,02)
Bea Masuk Anti Dumping	301.082.959.000	320.462.589.000	(6,05)
Bea Masuk Tindakan Pengamanan	2.157.234.342.000	3.301.463.950.342	(34,66)
Jumlah Bea Masuk	**50.891.762.896.870**	**51.077.726.593.610**	(0,36)
Bea Keluar:			
Bea Keluar	13.597.383.848.543	39.781.491.339.398	(65,82)
Denda Administrasi Bea Keluar	619.652.000	38.359.518.733	(98,38)
Pendapatan Bunga Bea Keluar	168.067.000	88.066.000	90,84
Jumlah Bea Keluar	**13.598.171.567.543**	**39.819.938.924.131**	(65,85)
Jumlah Pajak Perdagangan Internasional	**64.489.934.464.413**	**90.897.665.517.741**	(29,05)

F.2.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp611.990.337.922.242 dan Rp595.010.280.203.205. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp16.980.057.719.037 atau 2,85% dari TA 2022. Adapun rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Penerimaan SDA	254.203.031.073.614	268.770.896.270.784	(5,42)
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	82.058.743.373.870	40.597.091.946.149	102,13
Penerimaan PNBP Lainnya	179.868.171.315.795	195.739.979.810.678	(8,11)
Pendapatan BLU	95.860.392.158.963	89.902.312.175.594	6,63
Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak	**611.990.337.922.242**	**595.010.280.203.205**	**2,85**

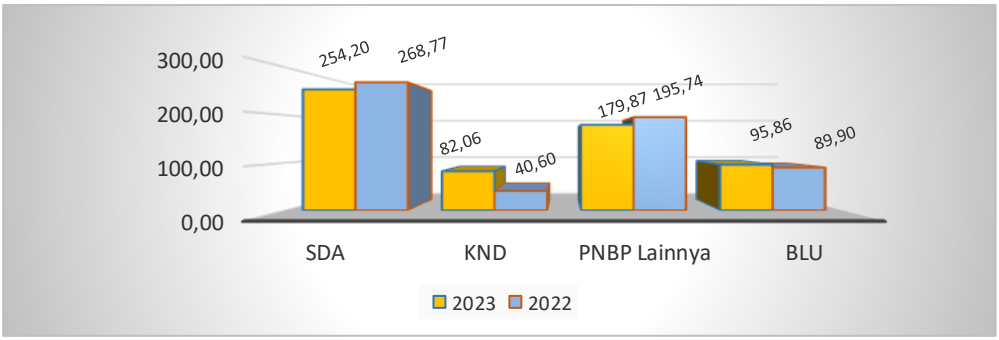

F.2.1.2.1. Pendapatan Sumber Daya Alam

Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp254.203.031.073.614 dan Rp268.770.896.270.784. Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp14.567.865.197.170 atau minus 5,42% dari TA 2022. Adapun rincian Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Pendapatan Minyak Bumi	87.408.885.465.416	111.992.940.458.410	(21,95)
Pendapatan Gas Bumi	28.769.670.492.312	36.705.949.688.708	(21,62)
Pendapatan Pertambangan Umum	129.126.791.868.349	110.786.795.000.708	16,55
Pendapatan Kehutanan	5.429.603.320.398	5.804.080.517.216	(6,45)
Pendapatan Perikanan	636.893.353.269	1.192.945.829.371	(46,61)
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	2.831.186.573.870	2.288.184.776.371	23,73
Jumlah Pendapatan SDA	**254.203.031.073.614**	**268.770.896.270.784**	**(5,42)**

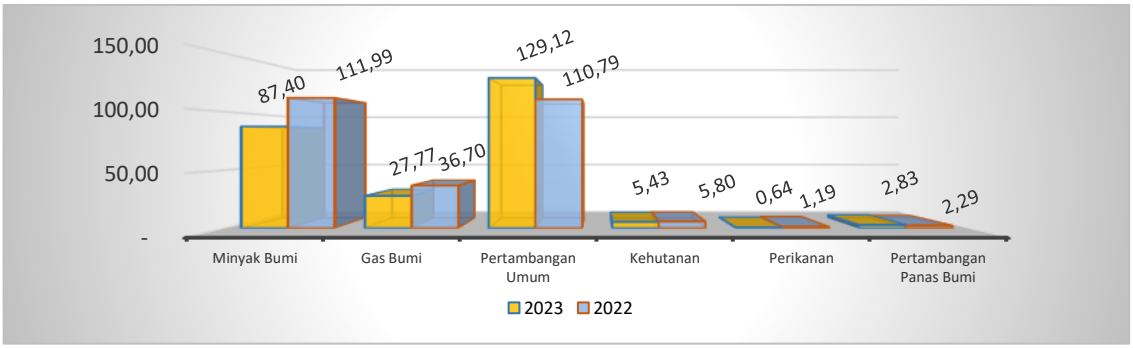

F.2.1.2.2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp82.058.743.373.870 dan Rp40.597.091.946.149. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp41.461.651.427.721 atau 102,13% dari TA 2022. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) berasal dari penerimaan laba yang diperoleh pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada Perusahaan Negara. Kenaikan sebesar 102,13% disebabkan karena kinerja BUMN mengalami peningkatan akibatnya pembagian dividen yang diterima oleh negara secara tunai juga meningkat. Peningkatan kinerja BUMN ini terutama pada sektor perbankan, industri energi, migas, pangan dan pupuk, mineral dan batu bara. Adapun rincian Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN	81.217.243.776.870	39.735.630.261.242	104,39
Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian Keuangan	841.499.597.000	861.461.684.907	(2,32)
Jumlah Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	**82.058.743.373.870**	**40.597.091.946.149**	**102,13**

F.2.1.2.3. Pendapatan PNBP Lainnya

Pendapatan PNBP Lainnya pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp179.868.171.315.795 dan Rp195.739.979.810.678. Pendapatan PNBP Lainnya pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp15.871.808.494.883 atau minus 8,11% dari TA 2022. Adapun rincian Pendapatan PNBP Lainnya adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi	51.186.655.069.677	84.763.757.395.235	(39,61)
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	28.028.272.839.161	22.171.748.332.761	26,41
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan	6.748.502.699.372	6.559.445.155.292	2,88
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	3.720.222.791.370	4.192.602.721.151	(11,27)
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	30.028.772.290.804	27.825.117.011.476	7,92
Pendapatan Jasa Lainnya	1.308.205.045.864	687.537.690.411	90,27
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	40.503.003.442.795	19.410.172.403.219	108,67
Pendapatan Denda	2.261.698.342.186	3.039.782.178.442	(25,60)
Pendapatan Lain-lain	16.082.838.794.566	27.089.816.922.691	(40,63)
Jumlah PNBP Lainnya	**179.868.171.315.795**	**195.739.979.810.678**	**(8,11)**

F.2.1.2.4. Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan Badan Layanan Umum pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp95.860.392.158.963 dan Rp89.902.312.175.594. Pendapatan Badan Layanan Umum pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp5.958.079.983.369 atau 6,63% dari TA 2022. Adapun rincian Pendapatan Badan Layanan Umum adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Pendapatan Jasa Layanan Umum	86.494.504.584.782	81.310.459.555.633	6,38
Pendapatan Hibah BLU	419.285.384.531	169.778.059.270	146,96
Pendapatan Hasil Kerja sama BLU	1.220.147.435.517	974.371.121.113	25,22
Pendapatan dari Alokasi APBN	820.701.691.766	3.245.497.850.139	(74,71)
Pendapatan BLU Lainnya	6.905.753.062.367	4.202.205.589.439	64,34
Jumlah Pendapatan Badan Layanan Umum	**95.860.392.158.963**	**89.902.312.175.594**	**6,63**

F.2.1.3. Penerimaan Hibah

Penerimaan Hibah pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp17.184.158.879.725 dan Rp5.696.055.413.792. Penerimaan Hibah tersebut merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumbangan dalam negeri perorangan, lembaga/badan usaha dan hibah dalam negeri lainnya. Selain itu juga berasal dari luar negeri perorangan, bilateral, multilateral dan hibah luar negeri lainnya. Penerimaan Hibah tersebut hanya merupakan penerimaan hibah berupa uang secara langsung maupun terencana. Penerimaan Hibah pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp11.488.103.465.933 atau 201,69% dari TA 2022. Kenaikan penerimaan hibah tersebut guna pengamanan pilkada tahun 2024 yang diterima oleh TNI dan Polri dan untuk penyelenggaraan pilkada serentak yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Adapun rincian Penerimaan Hibah adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Hibah Dalam Negeri Langsung:			
Bentuk Uang-Perorangan	-	766.400.000	(100,00)
Bentuk Uang-Lembaga/Badan Usaha	137.278.319.260	130.825.019.513	4,93
Bentuk Uang-Pemerintah Daerah	15.221.390.183.638	2.526.187.637.207	502,54
Bentuk Uang-Lainnya	2.760.643.874	14.915.464.452	(81,49)
Jumlah Hibah Dalam Negeri	**15.361.429.146.772**	**2.672.694.521.172**	**474,75**

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Hibah Luar Negeri Terencana:			
Bilateral	181.831.927.857	186.394.259.492	(2,45)
Multilateral	241.343.042.190	399.456.041.533	(39,58)
Hibah Luar Negeri Langsung:			
Perorangan	1.250.430.211	2.061.618.178	(39,35)
Bilateral	523.321.750.393	96.937.080.633	439,86
Multilateral	850.175.319.681	2.314.500.561.582	(63,27)
Lainnya	24.807.262.621	24.011.331.202	3,31
Jumlah Hibah Luar Negeri	**1.822.729.732.953**	**3.023.360.892.620**	**(39,71)**
Jumlah Hibah	**17.184.158.879.725**	**5.696.055.413.792**	**201,69**

F.2.1.4. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp412.711.324.466.564 dan Rp402.441.656.300.334. Belanja Pegawai pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp10.269.668.166.230 atau 2,55% dari TA 2022. Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah (di dalam negeri dan di luar negeri) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan selama periode akuntansi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Adapun rincian Belanja Pegawai sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	86.439.214.441.661	86.886.751.274.793	(0,52)
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	65.784.325.265.335	64.667.920.553.197	1,73
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	1.445.968.520.506	1.451.426.586.090	(0,38)
Belanja Gaji Dokter PTT	971.858.800	1.414.494.400	(31,29)
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	18.571.148.205.747	17.710.735.289.385	4,86
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	1.872.998.267.850	536.846.863.726	248,89
Belanja Honorarium	1.517.199.173.983	1.490.800.609.821	1,77
Belanja Lembur	906.265.365.184	902.549.970.369	0,41
Belanja Tunj.Khusus	84.744.625.483.910	84.032.922.061.487	0,85
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	140.283.278.472.696	133.926.708.913.263	4,75
Belanja Asuransi Kesehatan	11.145.329.410.892	10.833.579.683.803	2,88
Jumlah Belanja Pegawai	**412.711.324.466.564**	**402.441.656.300.334**	**2,55**

Kenaikan Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2023 terutama berasal dari kenaikan Belanja Pensiun dan Uang Tunggu sebesar Rp6.356.569.559.433 atau 4,75% dan kenaikan Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK sebesar Rp1.336.151.404.124 atau 248,89%.

F.2.1.5. Belanja Barang

Belanja Barang pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp432.714.969.865.127 dan Rp426.149.081.519.090. Belanja Barang pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp6.565.888.346.037 atau 1,54% dari TA 2022. Belanja Barang merupakan pengeluaran pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa non investasi guna mendukung kegiatan operasional pemerintahan. Adapun rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Belanja Barang	149.975.847.133.255	166.133.854.715.131	(9,73)
Belanja Jasa	50.333.964.148.889	41.614.533.719.335	20,95
Belanja Pemeliharaan	48.113.526.685.260	44.489.975.895.976	8,14
Belanja Perjalanan Dinas	48.305.891.764.735	37.975.602.578.401	27,20
Belanja Badan Layanan Umum	70.780.247.933.038	79.477.221.388.001	(10,94)
Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	65.188.725.039.787	56.156.161.774.746	16,08
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden	16.767.160.163	301.731.447.500	(94,44)
Jumlah Belanja Barang	**432.714.969.865.127**	**426.149.081.519.090**	**1,54**

F.2.1.6. Belanja Pembayaran Bunga Utang

Belanja Pembayaran Bunga Utang pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp439.882.584.341.259 dan Rp386.341.819.789.815. Belanja Pembayaran Bunga Utang pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp53.540.764.551.444 atau 13,86% dari TA 2022. Belanja Pembayaran Bunga Utang merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang *(outstanding principal)*, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman, dan pembayaran denda berupa imbalan bunga melalui rekening pengeluaran Bank Indonesia pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. Adapun rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Bunga Utang	432.848.465.786.637	368.714.320.461.357	17,39
Discount SUN	3.448.731.870.328	11.189.872.757.941	(69,18)
Loss On Bond Redemtion	536.653.910.900	1.337.452.801.614	(59,87)
Discount SBSN	3.048.732.773.394	5.100.173.768.903	(40,22)
Jumlah Pembayaran Bunga Utang	**439.882.584.341.259**	**386.341.819.789.815**	**13,86**

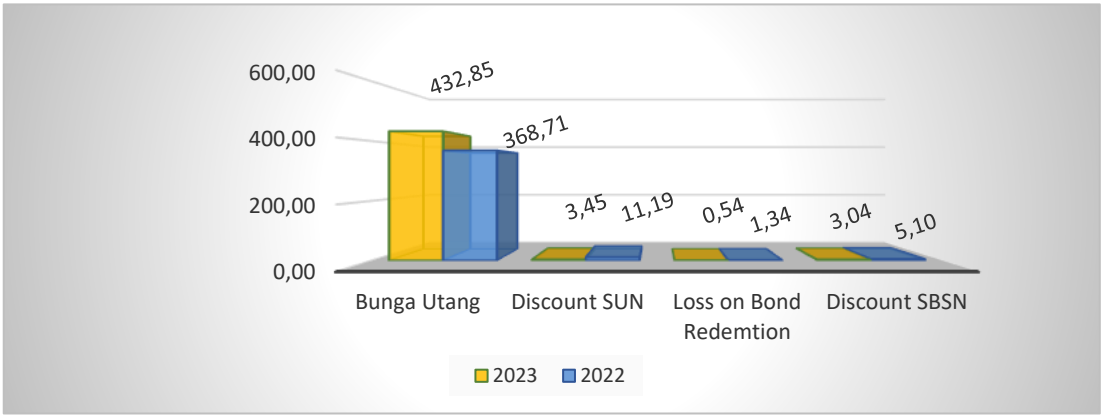

F.2.1.6.1. Pembayaran Bunga Utang

Pembayaran Bunga Utang pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp432.848.465.786.637 dan Rp368.714.320.461.357. Pembayaran Bunga Utang pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp64.134.145.325.280 atau 17,39% dari TA 2022. Pembayaran Bunga Utang merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas Surat Berharga Negara baik mata uang rupiah maupun valas, serta pembayaran denda berupa imbalan bunga. Adapun rincian Pembayaran Bunga Utang adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Belanja Pemby.Bunga Utang Dalam Negeri-Jangka Panjang	320.230.634.610.168	283.640.557.355.017	12,90
Belanja Pemb.Imbalan SBSN Dalam Negeri	82.042.499.639.521	72.349.854.787.991	13,40
Belanja Pemb.Bunga Utang Luar Negeri-Jangka Panjang	30.575.331.536.948	12.723.908.318.349	140,30
Jumlah Pembayaran Bunga Utang	**432.848.465.786.637**	**368.714.320.461.357**	**17,39**

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri 2023 dan TA 2022 masing-masing sebesar Rp30.575.331.536.948 dan Rp12.723.908.318.349. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas pinjaman program dan pinjaman proyek. Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri mengalami kenaikan sebesar Rp17.851.423.218.599 atau 140,30% dari TA 2022. Kenaikan tersebut karena adanya kenaikan utang program dan proyek di Tahun 2023. Adapun rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Belanja Bunga Pinjaman Program	16.041.674.225.787	5.883.922.682.379	172,64
Belanja Bunga Pinjaman Proyek	14.533.324.433.086	6.839.700.227.505	112,48
Belanja Pembayaran Biaya Transfer	332.878.075	285.408.465	16,63
Jumlah Pembayaran Bunga Utang LN	**30.575.331.536.948**	**12.723.908.318.349**	**140,30**

F.2.1.6.2. Belanja Pembayaran *Discount* Surat Utang Negara

Belanja Pembayaran *Discount* Surat Utang Negara pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.448.731.870.328 dan Rp11.189.872.757.941. Belanja Pembayaran *Discount* Surat Utang Negara pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp7.741.140.887.613 atau minus 69,18% dari TA 2022. Adapun rincian Belanja Pembayaran *Discount* Surat Utang Negara adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara	1.468.337.011.000	1.392.880.725.000	5,42
Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara	1.138.430.387.136	9.047.825.130.195	(87,42)
Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Valas	841.964.472.192	749.166.902.746	12,39
Jumlah Pembayaran Discount SUN	**3.448.731.870.328**	**11.189.872.757.941**	**(69,18)**

F.2.1.6.3. Belanja Pembayaran *Loss On Bond Redemption*

Belanja Pembayaran *Loss On Bond Redemption* pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp536.653.910.900 dan Rp1.337.452.801.614. Belanja Pembayaran *Loss On Bond Redemption* pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp800.798.890.714 atau 59,87% dari TA 2022. Belanja Pembayaran *Loss On Bond Redemption* merupakan belanja yang timbul saat pembelian kembali atau pelunasan atas obligasi negara saat jatuh tempo lebih besar dari nilai buku (*carrying amount*).

F.2.1.6.4. Belanja Pembayaran *Discount* Surat Berharga Syariah Negara

Belanja Pembayaran *Discount* Surat Berharga Syariah Negara pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.048.732.773.394 dan Rp5.100.173.768.903. Belanja Pembayaran *Discount* Surat Berharga Syariah Negara pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.051.440.995.509 atau minus 40,22% dari TA 2022. Adapun rincian Belanja Pembayaran *Discount* Surat Berharga Syariah Negara adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Belanja Pembayaran *Discount* SBSN - Jangka Panjang	2.719.227.753.394	4.900.097.616.903	(44,51)
Belanja Pembayaran *Discount* SPNS	329.505.020.000	200.076.152.000	64,69
Jumlah Pembayaran *Discount* SBSN	**3.048.732.773.394**	**5.100.173.768.903**	**(40,22)**

F.2.1.7. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp269.592.086.053.747 dan Rp252.812.907.867.326. Belanja Subsidi pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp16.779.178.186.421 atau 6,64% dari TA 2022. Belanja Subsidi merupakan belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat. Adapun rincian Belanja Subsidi sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Belanja Subsisi Perusahaan Negara Lembaga Non Keuangan-BBM	95.590.003.271.521	115.614.764.810.904	(17,32)
Belanja Subsisi Perusahaan Negara Lembaga Non Keuangan-Non BBM	119.346.845.627.560	94.767.430.477.784	25,94
Belanja Subsidi Perusahaan Negara Dalam Rangka PSO	5.092.347.517.157	6.309.491.129.344	(19,29)
Belanja Subsidi Perusahaan Swasta	45.323.860.034.309	3.523.116.596.732	1.186,47
Belanja Subsidi - Darurat Bencana	4.239.029.603.200	32.598.104.852.562	(87,00)
Jumlah Belanja Subsidi	**269.592.086.053.747**	**252.812.907.867.326**	**6,64**

F.2.1.8. Belanja Hibah

Belanja Hibah pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp219.140.718.777 dan Rp5.803.272.496.643. Belanja Hibah pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp5.584.131.777.866 atau minus 96,22% dari TA 2022. Belanja Hibah merupakan Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri, Kepada Organisasi Internasioal, dan Hibah Lainnya. Adapun rincian Belanja Hibah adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	69.824.315.937	33.829.048.077	106,40
Hibah Kepada Organisasi Internasional	149.215.239.063	13.676.743.266	991,01
Hibah Kepada Pemerintah Daerah	0	5.755.516.300.341	(100,00)
Hibah Lainnya (*Banking Commision*)	101.163.777	250.404.959	(59,60)
Jumlah Belanja Hibah	**219.140.718.777**	**5.803.272.496.643**	**(96,22)**

Kenaikan Belanja Hibah salah satunya karena pada TA 2023 terdapat kenaikan Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional. Adapun realisasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional diberikan kepada pemerintah luar negeri dan organisasi internasional antara lain negara-negara di Asia Tenggara, Afrika dan Melanesia, Papua Nugini, Afghanistan, Palestina, Ukraina, serta organisasi antara lain Sekretariat Organisation of African, Caribbean and Pacific States (OACPS), ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre), Global Fund, dan Melanesian Spearhead Group,

Penurunan Belanja Hibah TA 2023 yang signifikan disebabkan karena setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Hibah Kepada Pemerintah Daerah tidak disajikan pada pos Belanja Hibah (F.2.1.8) namun akan tersaji pada pos Hibah Kepada Daerah (F.2.1.19).

F.2.1.9. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp156.601.633.832.214 dan Rp161.523.078.405.990. Belanja Bantuan Sosial pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp4.921.444.573.776 atau 3,05% dari TA 2022. Belanja Bantuan Sosial merupakan uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Adapun rincian Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Rehabilitasi Sosial	1.281.281.715.566	614.198.479.237	108,61
Jaminan Sosial	67.709.313.222.239	63.192.475.915.731	7,15
Pemberdayaan Sosial	206.932.779.339	177.267.352.566	16,73
Perlindungan Sosial	82.368.469.578.565	30.840.927.705.975	167,08
Penanggulangan Kemiskinan	20.375.194.249	62.227.287.274.121	(99,97)
Penanggulangan Bencana	5.015.261.342.256	4.470.921.678.360	12,18
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	**156.601.633.832.214**	**161.523.078.405.990**	**(3,05)**

Penurunan Belanja Bantuan Sosial pada TA 2023, didominasi oleh belanja bantuan sosial untuk penanggulangan kemiskinan dalam bentuk uang dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang menurun sebesar Rp62.001.984.074.121 namun demikian diiringi dengan kenaikan belanja bantuan sosial untuk perlindungan sosial dalam bentuk uang sebesar Rp51.527.541.872.590.

F.2.1.10. Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp225.023.669.152.725 dan Rp404.385.774.531.710. Belanja Lain-lain pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp179.362.105.378.985 atau minus 44,35% dari TA 2022. Adapun rincian Belanja Lain-lain adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Belanja Lain-lain Dana Cadangan	12.875.144.605.421	5.541.378.587.250	132,35
Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN	121.245.799.637	93.648.376.675	29,47
Belanja Lain-lain BUN	206.775.576.705.309	379.968.882.402.407	(45,58)
Belanja Lain-lain Tanggap Darurat	0	16.381.452.464.426	(100,00)
Belanja Lain-lain Lainnya	5.251.702.041.664	2.400.412.698.186	118,78
Belanja Penyesuaian Selisih Kurs Invoice	694	2.766	(74,91)
Jumlah Belanja Lain-lain	**225.023.669.152.725**	**404.385.774.531.710**	**(44,35)**

Penurunan Belanja Lain-lain pada TA 2023 disebabkan karena tidak terdapat lagi realisasi Belanja Lain-lain Tanggap Darurat yang merupakan penanganan pandemi Covid-19. Namun demikian terdapat kenaikan Belanja Lain-lain Dana Cadangan yang digunakan untuk belanja cadangan beras pemerintah.

F.2.1.11. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak

Transfer Dana Bagi Hasil Pajak pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp63.845.997.623.000 dan Rp62.998.688.562.915. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp847.309.060.085 atau 1,34% dari TA 2022. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berupa penerimaan pajak yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Adapun rincian Transfer Dana Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan	41.526.659.300.000	37.677.680.471.742	10,22
Bagi Hasil PBB	22.319.338.323.000	25.321.008.091.173	(11,85)
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	**63.845.997.623.000**	**62.998.688.562.915**	**1,34**

F.2.1.12. Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Transfer Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp135.944.555.602.100 dan Rp100.823.947.472.776. Transfer Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp35.120.608.129.324 atau 34,83% dari TA 2022. Adapun rincian Transfer Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Bagi Hasil Minyak Bumi	16.491.258.147.000	14.388.156.301.036	14,62
Bagi Hasil Gas Bumi	11.738.041.628.000	13.022.127.844.187	(9,86)
Bagi Hasil Pertambangan Umum	99.425.415.550.000	68.713.989.486.607	44,69
Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	2.005.232.650.000	1.726.630.460.219	16,14
Bagi Hasil Kehutanan	1.984.193.334.100	1.868.480.715.683	6,19
Bagi Hasil Perikanan	1.095.637.785.000	1.104.562.665.044	(0,81)
Bagi Hasil Perkebunan Sawit	3.204.776.508.000	0	100,00
Jumlah Dana Bagi Hasil SDA	**135.944.555.602.100**	**100.823.947.472.776**	**34,83**

F.2.1.13. Transfer Dana Bagi Hasil Cukai

Transfer Bagi Hasil Cukai pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.876.010.795.530 dan Rp4.591.474.242.743. Transfer Bagi Hasil Cukai pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.284.536.552.787 atau 27,98% dari TA 2022.

F.2.1.14. Transfer Dana Alokasi Umum

Transfer Dana Alokasi Umum pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp398.029.628.594.542 dan Rp378.000.000.000.000. Transfer Dana Alokasi Umum pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp20.029.628.594.542 atau 5,30% dari TA 2022. Transfer Dana Alokasi Umum merupakan transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan propinsi/kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

F.2.1.15. Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik

Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp50.334.741.347.305 dan Rp54.783.954.054.112. Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp4.449.212.706.807 atau minus 8,12% dari TA 2022. Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik adalah alokasi dari APBN kepada propinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

F.2.1.16. Transfer Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan D.I.Y, dan Insentif Fiskal (IF)

Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan D.I.Y, dan Insentif Fiskal (IF) pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp26.520.021.192.724 dan Rp28.749.936.344.000. Dana Otonomi Khusus pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.229.915.151.276 atau minus 7,76% dari TA 2022. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Penggunaan Dana Otonomi Khusus ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah dana yang berasal dari bagian anggaran BUN yang dialokasikan mendanai kewenangan DIY sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Insentif Fiskal merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan kinerja tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintah Daerah. Kinerja dapat berupa pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan nasional. Rincian Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Insentif Fiskal Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut.

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Dana Otonomi Khusus Aceh	3.960.000.000.000	7.560.000.000.000	(47,62)
Dana Otonomi Khusus Papua	8.804.973.058.000	8.187.594.963.000	7,54
Dana Otonomi Khusus Papua Barat	4.476.290.512.000	4.688.668.607.000	(4,53)
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	1.372.725.809.224	1.320.000.000.000	3,99
Insentif Fiskal	7.906.031.813.500	6.993.672.774.000	13,05
Jumlah Transfer Dana Otsus, DIY, IF	**26.520.021.192.724**	**28.749.936.344.000**	**(7,76)**

F.2.1.17. Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Transfer Lainnya) pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp128.081.946.376.309 dan Rp118.380.687.000.719. Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Transfer Lainnya) pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp9.701.259.375.590 atau 8,19% dari TA 2022. Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Transfer Lainnya) adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Adapun rincian Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Transfer Lainnya) adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Dana Alokasi Khusus Non Fisik			
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	51.141.585.255.437	47.740.858.795.736	7,12
Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	1.166.575.891.867	991.045.485.177	17,71
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.094.401.455.075	51.345.762.364.395	3,41
Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dan Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah	15.705.734.730.625	12.372.977.755.955	26,94
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Ketenagakerjaan, Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Kepariwisataan	380.997.846.500	351.612.968.000	8,36
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan-Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD), Pendidikan Kesetaraan dan Museum dan Taman	5.731.123.396.805	4.899.777.558.456	16,97
Jumlah Dana Alokasi Khusus Non Fisik	**127.220.418.576.309**	**117.702.034.927.719**	**8,09**
Dana Alokasi Khusus Non Fisik II			
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	128.562.300.000	114.052.500.000	12,72
Dana Fasilitasi Penanaman Modal	247.386.450.000	221.756.002.000	11,56
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	292.704.050.000	197.786.550.000	47,99
Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	192.875.000.000	145.057.021.000	32,96
Jumlah Dana Alokasi Khusus Non Fisik II	**861.527.800.000**	**678.652.073.000**	**26,95**
Jumlah Dana Alokasi Khusus Non Fisik	**128.081.946.376.309**	**118.380.687.000.719**	**8,19**

Kenaikan Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2023 terutama berasal kenaikan Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus sebesar Rp3.400.726.459.701 atau 7,12% dan kenaikan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dan Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah sebesar Rp3.332.756.974.670 atau 26,94%.

F.2.1.18. Dana Desa

Dana Desa pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp69.856.768.617.317 dan Rp67.906.138.390.431. Dana Desa pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.950.630.226.886 atau 2,87% dari TA 2022. Dana Desa merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dan Desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Sejak tahun 2021 Transfer ke Daerah dan Dana Desa dilakukan melalui penyaluran langsung ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran tersebut dilakukan dengan cara pemotongan Dana Desa setiap daerah Kabupaten/Kota untuk kemudian dana pemotongan tersebut disalurkan ke RKD.

F.2.1.19. Hibah Kepada Daerah

Hibah Kepada Daerah pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.940.874.059.627 dan Rp0. Hibah Kepada Daerah pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.940.874.059.627 atau 100% dari TA 2022. Pada TA 2022 Hibah Kepada Daerah tersaji pada Belanja Hibah (F.2.1.8). Hibah Kepada Daerah merupakan dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Adapun rincian Hibah Kepada Daerah adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	1.977.982.930.618	0	100,00
Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	143.405.713.248	0	100,00
Hibah kepada daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan	819.485.415.761	0	100,00
Jumlah Hibah Kepada Daerah	**2.940.874.059.627**	**0**	**100,00**

F.2.2. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas bersih netto dari Aktivitas Investasi pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar minus Rp391.624.901.747.838 dan minus Rp347.174.022.486.045. Arus Kas dari Aktivitas Investasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp44.450.879.261.793 atau minus 12,80% dari TA 2022. Penurunan arus kas bersih netto dari Aktivitas Investasi pada TA 2023 terutama berasal dari adanya penurunan arus kas masuk pada penerimaan investasi pemerintah serta kenaikan arus kas keluar pada belanja modal dan pembiayaan dana bergulir. Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Adapun rincian Arus Kas bersih netto dari Aktivitas Investasi adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Arus Masuk	28.445.607.957.179	28.333.153.856.434	0,40
Dikurangi Arus Keluar	420.070.509.705.017	375.507.176.342.479	11,87
Arus Kas Bersih	**(391.624.901.747.838)**	**(347.174.022.486.045)**	**12,80**

F.2.2.1. Pengelolaan dan Penjualan BMN

Pengelolaan dan Penjualan BMN pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp546.960.660.401 dan Rp584.273.977.400. Pengelolaan dan Penjualan BMN pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp37.313.316.999 atau minus 6,39% dari TA 2022. Pengelolaan dan Penjualan BMN merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan Aset Tetap baik berupa rumah tinggal, kendaraan bermotor, dan aset yang rusak atau berlebihan. Adapun rincian Pengelolaan dan Penjualan BMN adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	13.995.886.365	15.693.033.806	(10,81)
Penjualan Peralatan dan Mesin	229.347.995.025	192.382.505.577	19,21
Penjualan Sewa Beli	6.017.182.562	7.513.819.425	(19,92)
Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	2.518.000	0	100,00
Tukar Menukar Peralatan dan Mesin	201.009.000	0	100,00
Pemindahtanganan BMN Lainnya	294.338.894.442	361.215.427.609	(18,51)
Pendapatan Atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	3.057.175.007	7.469.190.983	(59,07)
Jumlah Pengelolaan & Penjualan BMN	**546.960.660.401**	**584.273.977.400**	**(6,39)**

F.2.2.2. Penjualan Aset Program Restrukturisasl

Pendapatan Penjualan Aset Program Restrukturisasi pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.097.737.606.166 dan Rp667.176.265.512. Pendapatan Penjualan Aset Program Restrukturisasi pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp430.561.340.654 atau 64,53% dari TA 2022. Penjualan Aset Program Restrukturisasi merupakan penerimaan yang berasal dari Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN dan Aset Bekas Milik eks Bank Dalam Likuidasi (BDL). Adapun rincian Pendapatan Penjualan Aset Program Restrukturisasi adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	1.030.646.856.018	643.617.367.500	60,13
Penjualan/Penyelesaian Aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)	67.090.750.148	23.558.898.012	184,78
Jumlah Penjualan Aset Program Restrukturisasi	**1.097.737.606.166**	**667.176.265.512**	**64,53**

F.2.2.3. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir

Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp359.653.415.387 dan Rp22.000.000.000. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp337.653.415.387. Penerimaan pembiayaan dana bergulir tersebut merupakan angsuran pelunasan pinjaman pokok dana bergulir BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT berdasarkan perjanjian antara para BUJT dengan BPJT.

F.2.2.4. Penerimaan Investasi Pemerintah

Penerimaan Investasi Pemerintah pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp26.441.256.275.225 dan Rp27.059.703.613.522. Penerimaan Investasi Pemerintah pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp618.447.338.297 atau minus 2,29% dari TA 2022. Penerimaan Investasi Pemerintah merupakan Penerimaan Kembali Investasi dan Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah. Rincian penerimaan investasi pemerintah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Penerimaan Kembali Investasi			
Penerimaan Pembiayaan Investasi Pemerintah Nonpermanen dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	3.437.500.000.000	-	100,00
Penerimaan Pembiayaan Investasi Pemerintah Non Permanen atas Transaksi pada Rekening Investasi Pemerintah PEN (RIPPEN)	1.847.519.139.000	8.701.143.500.000	(78,77)
Jumlah Penerimaan Kembali Investasi	**5.285.019.139.000**	**8.701.143.500.000**	**(39,26)**
Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah			
Penerimaan Pengembalian Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	2.944.155.651.898	2.311.496.745.459	27,37
Penerimaan Pembiayaan atas Pengembalian Dana Cadangan Pemerintah pada BLU	4.997.550.000	-	100,00
Penerimaan yang Berasal dari Manajemen Aset Negara	18.207.083.934.327	16.047.063.368.063	13,46
Jumlah Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah	**21.156.237.136.225**	**18.358.560.113.522**	**15,24**
Jumlah	**26.441.256.275.225**	**27.059.703.613.522**	**(2,29)**

F.2.2.5. Belanja Modal

Belanja Modal pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp303.041.293.068.751 dan Rp240.570.302.124.070. Belanja Modal pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp62.470.990.944.681 atau 25,97% dari TA 2022. Kenaikan Belanja Modal terbesar terdapat pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin yaitu sebesar Rp37.991.593.631.553 dibanding dengan TA 2022. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Adapun rincian Belanja Modal sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Modal Tanah	21.762.067.765.333	19.595.016.027.337	11,06
Peralatan dan Mesin	138.693.504.896.413	100.701.911.264.860	37,73
Gedung dan Bangunan	38.664.408.477.682	30.368.008.162.912	27,32
Jalan, Irigasi dan Jaringan	91.301.385.315.249	72.951.253.743.088	25,15
Lainnya	5.445.554.835.621	6.754.076.109.763	(19,37)
Modal BLU	7.174.371.778.453	10.200.036.816.110	(29,66)
Jumlah Belanja Modal	**303.041.293.068.751**	**240.570.302.124.070**	**25,97**

F.2.2.6. Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional

Pembiayaan Pengembangan Pendidikan pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp20.000.000.000.000 dan Rp20.000.000.000.000. Realisasi Pembiayaan Pengembangan Pendidikan Nasional pada TA 2023 sama dengan realisasi TA 2022.

F.2.2.7. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir

Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.225.200.000.000 dan Rp0. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.225.200.000.000 atau 100,00% dari TA 2022.

F.2.2.8. Penyertaan Modal Negara

Penyertaan Modal Negara pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp41.421.985.992.266 dan Rp60.664.867.718.409. Penyertaan Modal Negara pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp19.242.881.726.143 atau 31,72% dari TA 2022. Penyertaan Modal Negara adalah penyertaan modal Pemerintah Pusat dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah, PMN/Dana Investasi Pemerintah. Adapun rincian Penyertaan Modal Negara adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Penyertaan Modal Negara pada BUMN	39.862.353.463.337	59.158.999.889.336	(32,62)
Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan	1.559.632.528.929	1.005.867.829.073	55,05
PMN Lainnya	0	500.000.000.000	(100,00)
Jumlah Penyertaan Modal Negara	**41.421.985.992.266**	**60.664.867.718.409**	**(31,72)**

Penurunan Penyertaan Modal Negara pada TA 2023 salah satunya disebabkan karena Penyertaan Modal Negara pada BUMN sebesar Rp19.296.646.425.999 namun demikian diiringi dengan kenaikan Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan. Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan pada 6 Lembaga Keuangan Internasional dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2023
1	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	45.891.000.000
2	International Development Association (IDA)	259.405.270.000
3	Islamic Development Bank (IsDB)	262.234.488.551
4	International Finance Corporation (IFC)	348.532.048.980
5	Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)	137.673.000.000
6	International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) General Capital Increase	505.896.721.398
	International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) Selective Capital Increase	
Jumlah Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan		**1.559.632.528.929**

F.2.2.9. Pengeluaran Investasi Pemerintah

Pengeluaran Investasi Pemerintah pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp53.382.030.644.000 dan Rp54.272.006.500.000. Pengeluaran Investasi Pemerintah pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp889.975.856.000 atau minus 1,64% dari TA 2022. Adapun rincian Pengeluaran Investasi Pemerintah adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Investasi pemerintah	26.827.519.139.000	24.301.143.500.000	10,40
Pengeluaran Pembiayaan untuk Manajemen Aset Aset Negara	25.424.000.000.000	28.840.000.000.000	(11,84)
Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengelolaan Dana Rehabilitasi Mangrove pada BLU BPDLH	800.000.000.000	0	100,00
Investasi Pemerintah dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah	330.511.505.000	1.130.863.000.000	(70,77)
Jumlah Pengeluaran Investasi Pemerintah	**53.382.030.644.000**	**54.272.006.500.000**	**(1,64)**

Penurunan Pengeluaran Investasi Pemerintah pada TA 2023 salah satunya disebabkan karena penurunan Investasi Pemerintah dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebesar Rp800.351.495.000. Investasi Pemerintah dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah merupakan pengeluaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional untuk proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui badan usaha penjaminan infrastruktur, percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara, percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera, percepatan penyelenggaraan light rail transit/LRT Jabodebek, percepatan infrastruktur ketenagalistrikan dan untuk pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN.

F.2.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp445.794.317.054.009 dan Rp698.166.134.429.528. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp252.371.817.375.519 atau minus 36,15% dari TA 2022. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim (tuntutan) pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan tuntutan pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Adapun rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Arus Masuk	1.072.010.651.415.779	1.219.817.004.057.156	(12,12)
Dikurangi Arus Keluar	626.216.334.361.770	521.650.869.627.628	20,05
Arus Kas Bersih	**445.794.317.054.009**	**698.166.134.429.528**	**(36,15)**

F.2.3.1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp902.837.385.270.107 dan Rp1.107.581.763.373.185. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp204.744.378.103.078 atau minus 18,49% dari TA 2022. Adapun rincian Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Penerimaan Pembiayaan DN-Perbankan	37.225.200.000.000	0	100,00%
Penjualan Surat Berharga Negara-Rupiah	757.734.589.688.370	973.418.285.498.601	(22,16)
Penjualan Surat Beharga Negara-Valas	90.373.466.054.058	124.037.949.770.694	(27,14)
Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri	17.504.129.527.679	10.125.528.103.890	72,87
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	**902.837.385.270.107**	**1.107.581.763.373.185**	**(18,49)**

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri berasal dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri Perbankan pada TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp37.225.200.000.000 dan Rp0. Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri Perbankan sebesar Rp37.225.200.000.000 atau 100,00% dari TA 2022. Adapun rincian Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL)	35.000.000.000.000	0	100,00%
Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Pembangunan Hutan	2.225.200.000.000	0	100,00%
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	**37.225.200.000.000**	**0**	**100,00%**

b. Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN) – Rupiah

Penerimaan pembiayaan SBN merupakan penerimaan pembiayaan dari penjualan Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi Negara, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam mata uang rupiah. Penerimaan pembiayaan SBN pada TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp757.734.589.688.370 dan Rp973.418.285.498.601 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara	34.542.000.000.000	68.605.000.000.000	(49,65)
Penerimaan dari Penjualan Obligasi Negara	450.925.819.706.060	648.951.017.006.441	(30,51)
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri	224.088.336.686.968	209.102.808.095.159	7,17
Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Syariah	13.830.000.000.000	17.223.000.000.000	(19,70)
Penerimaan Penerbitan SBSN Dalam Rangka Pembiayaan Proyek	34.348.433.295.342	29.536.460.397.001	16,29
Jumlah Penerimaan SBN-Rupiah	**757.734.589.688.370**	**973.418.285.498.601**	**(22,16)**

Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Pembiayaan SBN Rupiah sebesar Rp215.683.695.810.231 atau 22,16% dari TA 2022.

c. Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN) – Valas

Penerimaan pembiayaan SBN – Valuta Asing pada TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp90.373.466.054.058 dan Rp124.037.949.770.694, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Penerbitan Penjualan Obligasi Luar Negeri-Valas	58.975.466.054.058	74.532.499.770.694	(20,87)
Penerbitan/Penjualan SBSN Valas-Jangka Panjang	31.398.000.000.000	49.505.450.000.000	(36,58)
Jumlah Penerimaan SBSN-Valas	**90.373.466.054.058**	**124.037.949.770.694**	**(27,14)**

Sesuai dengan tabel diatas, terdapat penurunan Penerimaan Pembiayaan SBN – Valas sebesar Rp33.664.483.716.636 atau minus 27,14% dari TA 2022, yang berasal dari penurunan Penerimaan Penerbitan Penjualan Obligasi Luar Negeri – Valuta Asing sebesar Rp15.557.033.716.636 atau turun 20,87% serta berasal dari penurunan Penerbitan/Penjualan SBSN Valas – Jangka Panjang sebesar Rp18.107.450.000.000 atau minus 36,58%.

d. Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri

Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri pada TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp17.504.129.527.679 dan Rp10.125.528.103.890, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	16.672.197.186.598	10.125.528.103.890	64,66
Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri dari Perusahaan Daerah	831.932.341.081	0	100,00
Jumlah Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri	**17.504.129.527.679**	**10.125.528.103.890**	**72,87**

F.2.3.2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp162.650.352.798.218 dan Rp108.283.083.586.601. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp54.367.269.211.617 atau 50,21% dari TA 2022. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri adalah seluruh penerimaan pemerintah sehubungan dengan penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari Pinjaman Program/Tunai dan Pinjaman Proyek/Kegiatan. Pinjaman Proyek/Kegiatan merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan yang disusun oleh BAPPENAS dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah, berdasarkan usulan dari Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN. Adapun rincian Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Pinjaman Program / Tunai	82.990.780.840.684	65.592.711.439.666	26,52
Pinjaman Proyek / Kegiatan	79.659.571.957.534	42.690.372.146.935	86,60
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	**162.650.352.798.218**	**108.283.083.586.601**	**50,21**

F.2.3.3. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman

Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.374.398.495.969 dan Rp3.952.157.097.370. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.422.241.398.599 atau 61,29% dari TA 2022. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman merupakan penerimaan Pemerintah atas cicilan pengembalian Pinjaman *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) yang terdiri dari penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman kepada Pemda, BUMD, dan BUMN. Adapun rincian Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri	2.041.258.121.405	29.858.499.715	6.736,44
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri	4.333.140.374.564	3.922.298.597.655	10,47
Jumlah Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	**6.374.398.495.969**	**3.952.157.097.370**	**61,29**

F.2.3.4. Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain

Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp148.514.851.485 dan Rp0 atau sebesar 100% dari TA 2022. Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain merupakan Penerimaan Pembiayaan atas Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

F.2.3.5. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri pada TA 2023 dan TA 2022 sebesar Rp542.860.028.458.620 dan Rp440.563.575.597.568. Realisasi pengeluaran pembiayaan dalam negeri pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp102.296.452.861.052 atau 23,22% dari TA 2022. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri digunakan untuk pembiayaan dalam negeri perbankan dan non perbankan, pelunasan surat berharga negara dalam mata uang rupiah dan valuta asing. Adapun rincian Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Pelunasan SBN-Rupiah	441.536.249.313.377	342.589.967.131.663	28,88
Pelunasan SBN-Valas	98.378.018.023.089	96.049.362.716.256	2,42
Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri	2.945.761.122.154	1.924.245.749.649	53,09
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	**542.860.028.458.620**	**440.563.575.597.568**	**23,22**

F.2.3.6. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp81.450.306.790.493 dan Rp79.281.905.245.457. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.168.401.545.036 atau 2,74% dari TA 2022. Adapun rincian Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Cicilan Pokok Utang LN-Pinjaman Tunai	41.620.171.896.141	37.619.613.777.567	10,63
Cicilan Pokok Utang LN-Pinjaman Kegiatan	39.830.134.894.352	41.662.291.467.890	(4,40)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan LN	**81.450.306.790.493**	**79.281.905.245.457**	**2,74**

F.2.3.7. Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari Subsidiary Loan Agreement

Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari Subsidiary Loan Agreement pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.905.999.112.657 dan Rp1.805.388.784.603. Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari Subsidiary Loan Agreement pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 100.610.328.054 atau 5,57% dari TA 2022. Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari Subsidiary Loan Agreement merupakan pengeluaran pemerintah atas atas penerusan pinjaman luar negeri yang diberikan untuk Pemda/BUMN/BUMD.

F.2.4. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp88.761.873.212.786 dan Rp20.042.387.123.266. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris sampai dengan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp68.719.486.089.520 atau 342,87% dari TA 2022. Kenaikan Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris TA 2023 terutama berasal dari kenaikan transaksi Netto Non Anggaran Pihak Ketiga. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi APBN. Adapun rincian Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Perhitungan Fihak Ketiga (Netto)	620.329.866.094	151.170.449.070	310,35
Transito (Netto)	14.112.089.380.009	(3.468.162.038.412)	(506,90)
Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga	74.033.583.845.555	23.360.027.823.784	216,92
Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Netto)	(4.129.878.872)	(649.111.176)	536,24
Arus Kas Bersih	**88.761.873.212.786**	**20.042.387.123.266**	**342,87**

F.2.4.1. Perhitungan Fihak Ketiga (Netto)

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp620.329.866.094 dan Rp151.170.449.070. Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp469.159.417.024 atau 310,35% dari TA 2022. Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) berasal dari penerimaan pemerintah yang berasal dari sejumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) atau diterima secara tunai untuk fihak ketiga, seperti potongan gaji, pensiun,beras BULOG, dan PFK lainnya dikurangi dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan pemerintah kepada fihak ketiga yang berhak menerimanya dan transitoris Fihak Ketiga. Adapun rincian Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
PENERIMAAN NON ANGGARAN PFK			
Penerimaan PFK 10% Gaji	26.362.502.018.784	25.504.271.807.301	3,37
Penerimaan PFK 2% Gaji Terusan	-	-	-
Penerimaan PFK Beras BULOG	281.475.805.508	301.458.681.292	(6,63)
Penerimaan PFK 3% Iuran Kesehatan Pemda	9.599.384.497.952	9.730.400.014.403	(1,35)
Penerimaan PFK Simpanan Peserta TAPERA	(4.132.913.455)	1.074.346.520	(484,69)
Potongan PFK 1% Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain	5.834.445.783	4.340.889.187	34,41
Penerimaan PFK Lain-lain	475.468.203.386	507.093.858.839	(6,24)
Penerimaan PFK Setoran Pajak Rokok dan Piutang Lainnya	91.622.390.275.538	89.956.796.341.185	1,85
Jumlah Penerimaan PFK	**128.342.922.333.496**	**126.005.435.938.727**	**1,86**
PENGELUARAN NON ANGGARAN PFK			
Pengeluaran PFK 10% Gaji	22.022.336.757.752	22.021.688.086.123	0,00
Pengembalian Penerimaan PFK 2% Gaji Terusan	2.136.557.552.256	2.028.180.273.264	5,34
Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog	281.484.698.786	301.480.627.378	(6,63)
Pengembalian Penerimaan PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan	11.674.123.619.963	11.327.710.057.307	3,06
Pengembalian Penerimaan PFK Simpanan Peserta TAPERA	-	-	-
Pengembalian Penerimaan PFK 1% Jaminan Kesehatan anggota keluarga Lain	6.382.422.812	3.895.699.233	63,83
Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain	476.519.434.552	517.251.051.376	(7,87)
Pengeluaran PFK Setoran Pajak Rokok dan Piutang Lainnya	91.125.187.981.281	89.654.059.694.976	1,64
Jumlah Pengeluaran PFK	**127.722.592.467.402**	**125.854.265.489.657**	**1,48**
JUMLAH PFK (Netto)	**620.329.866.094**	**151.170.449.070**	**310,35**

F.2.4.2. Transito (Netto)

Transito pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp14.112.089.380.009 dan minus Rp3.468.162.038.412. Transito pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp17.580.251.418.421 atau 506,90% dari TA 2022. Transito merupakan transaksi BUN yang terkait dengan Pengeluaran Uang Persediaan (UP) TA berjalan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Penerimaan atas Pengembalian UP tersebut. Pengembalian UP dari Kuasa Pengguna Anggaran dapat berupa UP yang diterima TA berjalan maupun TA yang lalu. Adapun rincian transito adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Penerimaan Transito:			
Penerimaan Transito	8.492.558.276.699	9.307.539.574.005	(8,76)
Penerimaan Transito Tambahan Uang Persediaan	45.089.190.780.727	76.949.092.307.037	(41,40)
Penerimaan Escrow	44.573.170.856.122	29.805.455.049.871	49,55
Jumlah Penerimaan Transito	**98.154.919.913.548**	**116.062.086.930.913**	**(15,43)**
Pengeluaran Transito:			
Pengeluaran Transito	8.436.736.010.724	9.214.959.096.181	(8,45)
Pengeluaran Transito Tambahan Uang Persediaan	45.107.694.556.983	76.934.674.527.894	(41,37)
Pengeluaran Escrow	30.498.399.965.832	33.380.615.345.250	(8,63)
Jumlah Pengeluaran Transito	**84.042.830.533.539**	**119.530.248.969.325**	**(29,69)**
Jumlah Transito (Nettto)	**14.112.089.380.009**	**(3.468.162.038.412)**	**(506,90)**

F.2.4.3. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Netto)

Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp74.033.583.845.555 dan Rp23.360.027.823.784. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp50.673.556.021.771 atau 216,92% dari TA 2022. Penerimaan/Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga timbul antara lain karena transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya yangmana termasuk penerimaan DBH pada rekening TDF-TKD, Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas dan Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas. Adapun rincian Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
PENERIMAAN NON ANGGARAN PIHAK KETIGA			
Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	45.350.255.055	3.668.620.729	1.136,17
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	85.578.399.047.009	67.653.593.843.752	26,49
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya	1.015.151.541.826.392	1.174.714.894.129.607	(13,58)
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	4.432.932.220.347	718.693.308.384	516,80
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas	774.821.766.650.951	637.136.376.401.370	21,61
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Dalam Rekening Khusus	14.797.174.012.904	12.235.900.092.053	20,93
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	155.068.282.181.648	59.240.475.106.648	161,76
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan Sistem Perbankan	22.968.090.595.650	24.788.242.815.554	(7,34)
Jumlah Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	**2.072.863.536.789.956**	**1.976.491.844.318.097**	**4,88**
PENGELUARAN NON ANGGARAN PIHAK KETIGA			
Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	44.972.698.972	3.632.606.027	1.138,03
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	85.700.490.333.165	67.656.545.297.434	26,67
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya	894.226.796.795.500	1.104.622.742.269.127	(19,05)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	47.446.280.050.848	47.607.131.905.781	(0,34)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas	773.583.870.244.984	636.976.599.635.567	21,45
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Dalam Rekening Khusus	14.793.837.834.010	12.239.255.767.493	20,87
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	160.068.282.181.648	59.240.475.106.648	170,20
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan Sistem Perbankan	22.965.422.805.274	24.785.433.906.236	(7,34)
Jumlah Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	**1.998.829.952.944.401**	**1.953.131.816.494.313**	**2,34**
Jumlah Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Netto)	**74.033.583.845.555**	**23.360.027.823.784**	**216,92**

F.2.4.4. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Netto)

Kiriman Uang Antar Rekening Bank pada TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar minus Rp4.129.878.872 dan minus Rp649.111.176. Kiriman Uang Antar Rekening Bank pada TA 2023

mengalami penurunan sebesar minus Rp3.480.767.696 atau minus 536,24% dari TA 2022. Kiriman Uang (KU) antara lain merupakan penerimaan dan pengeluaran kiriman uang antar rekening pemerintah yang berasal dari KPPN ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan dan sebaliknya. Pemindahbukuan intern rekening BUN dan pemindahbukuan intern KPPN.

Dalam transaksi KU TA 2023 dan TA 2022 masih terdapat selisih antara penerimaan dengan pengeluaran KU yang disebabkan belum sepenuhnya seluruh transaksi atas rekening yang saling terkait dengan transaksi kas dibukukan dalam Sistem Akuntansi Pusat, adanya *time lag* antara saat pengiriman dan saat penerimaan kiriman uang serta ketidaktepatan dalam penggunaan akun. Adapun rincian Kiriman Uang Antar Rekening Bank adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Penerimaan Kiriman Uang Antar Rekening Bank	21.643.466.376.177.919	20.410.110.617.317.699	6,04
Pengeluaran Kiriman Uang Antar Rekening Bank	21.643.470.506.056.791	20.410.111.266.428.875	6,04
Jumlah Kiriman Uang (Netto)	**(4.129.878.872)**	**(649.111.176)**	**(536,24)**

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

G.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ringkasan Perubahan Ekuitas BUN Tahun 2023 *Audited* dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

URAIAN	2023	2022
A. EKUITAS AWAL	**(3.262.260.267.295.775)**	**(2.842.111.919.515.711)**
B. SURPLUS/DEFISIT LO	**(1.463.681.266.458.881)**	**(1.718.001.589.034.153)**
C. KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		
1. Koreksi Nilai Persediaan	59.355.000	500.000
2. Koreksi Nilai Aset Tetap/ Lainnya Non Revaluasi	(4.984.035.702.940)	4.723.195.634.678
3. Mutasi Ekuitas Bersih Badan Lainnya	229.322.791.975	5.281.424.623.005
4. Koreksi SAL	1.498.554.940.209	9.431.660.376.686
5. Lain-lain	37.762.853.060.389	(20.785.248.684.369)
Jumlah Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas	**34.506.754.444.633**	**(1.348.967.550.000)**
D. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	**1.338.745.845.087.589**	**1.301.105.973.365.087**
E. KEUNTUNGAN / (KERUGIAN) SELISIH KURS YANG BELUM TEREALISASI		-
F. MUTASI EKUITAS BUN DI K/L		
1. Mutasi Kas Di Bendahara Pengeluaran	(18.216.293.568)	(32.123.110.511)
2. Mutasi Kas Lainnya Di K/L Dari Hibah	11.096.844.487.771	1.150.651.829.898
3. Mutasi Kas BLU	13.422.355.639.754	(3.022.293.280.385)
Jumlah Mutasi Ekuitas BUN Di K/L	**24.500.983.833.957**	**(1.903.764.560.998)**
KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS (B+C+D+E+F)	**(65.927.683.092.702)**	**(420.148.347.780.064)**
G. EKUITAS AKHIR (A+B+C+D+E+F)	**(3.328.187.950.388.477)**	**(3.262.260.267.295.775)**

G.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

G.2.1. EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022 sebesar minus Rp3.262.260.267.295.775 dan minus Rp2.842.111.919.515.711. Rincian nilai Ekuitas awal tersebut adalah:

Kode BA	Uraian BA BUN	Ekuitas Awal 2023	Ekuitas Awal 2022
999.00	Akuntansi Pusat	536.433.009.418.783	374.294.862.224.462
999.01	BA BUN Utang Pemerintah	(7.861.967.689.868.841)	(7.002.922.160.308.460)
999.02	BA BUN Hibah	-	2.948.996.133
999.03	BA BUN Investasi Pemerintah	3.827.718.880.770.840	3.536.884.490.200.420
999.04	BA BUN Pen erusan Pinjaman	60.907.330.544.608	63.094.611.585.043
999.05	BA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa	(64.787.229.735.828)	(25.868.774.753.208)
999.06	BA BUN BSBL Likuidasi	-	-
999.07	BA BUN Belanja Subsidi	(42.327.401.721.901)	(34.037.729.327.802)
999.08	BA BUN Belanja Lain-lain	(67.223.517.455.607)	(107.218.916.164.076)
999.09	Badan Lainnya	29.625.443.493.878	24.344.018.870.873
999.99	BA BUN Transaksi Khusus	335.898.064.063.777	350.419.211.832.015
Jumlah Ekuitas Awal		**(3.245.723.110.490.291)**	**(2.821.007.436.844.599)**
Eliminasi		**(16.537.156.805.485)**	**(21.104.482.671.112)**
Ekuitas Setelah eliminasi		**(3.262.260.267.295.775)**	**(2.842.111.919.515.711)**

**selisih 1 rupiah disebabkan adanya pembulatan*

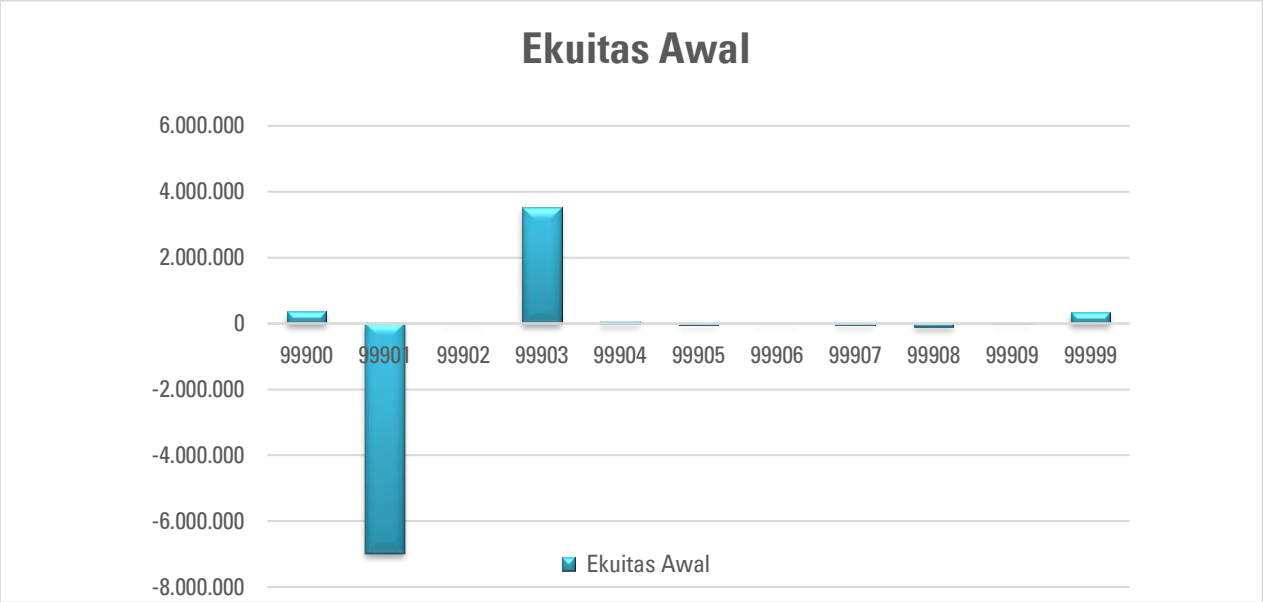

Eliminasi sebesar minus Rp16.537.156.805.485 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Eliminasi Tahun Anggaran 2022 sebesar minus Rp21.104.482.671.112;
2. Eliminasi pada pos surplus/defisit LO tahun 2022 yang berasal dari Bagian pemerintah dari penerimaan panas bumi yang belum dipindahbukukan sebesar Rp196.010.334.104;
3. Eliminasi pada pos Koreksi Lain-lain tahun 2022 yang berasal dari mutasi dana yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp4.570.280.500.000;
4. pemindahbukuan PNBP panas bumi TW I TA 2022 dimana sebelumnya sudah diakui sebagai beban diestimasi setoran kepada pemerintah sebesar minus Rp198.964.968.477.

G.2.2. SURPLUS/DEFISIT LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar minus Rp1.463.681.266.458.881 dan minus Rp1.718.001.589.034.153. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Rincian nilai Defisit LO adalah:

No	UNIT		2023	2022
	KODE	URAIAN		
1	999.01	BA BUN Utang	(421.690.613.300.497)	(549.237.791.548.700)
2	999.02	BA BUN Hibah	26.678.116.010.227	12.269.174.227.271
3	999.03	BA BUN Investasi Pemerintah	282.393.665.133.566	251.598.530.961.114
4	999.04	BA BUN Pemberian Pinjaman	(688.960.243.506)	1.167.410.036.380
5	999.05	BA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa	(881.054.892.672.236)	(818.910.256.445.429)
6	999.07	BA BUN Belanja Subsidi	(251.938.090.750.443)	(253.107.160.573.801)
7	999.08	BA BUN Belanja Lain-lain	(228.289.098.375.022)	(362.940.812.213.784)
8	999.99	BA BUN Transaksi Khusus	10.526.875.729.068	963.306.188.692
JUMLAH			**(1.464.062.998.468.843)**	**(1.718.197.599.368.257)**
Penyesuaian			**381.732.009.962**	**196.010.334.104**
JUMLAH AKHIR			**(1.463.681.266.458.881)**	**(1.718.001.589.034.153)**

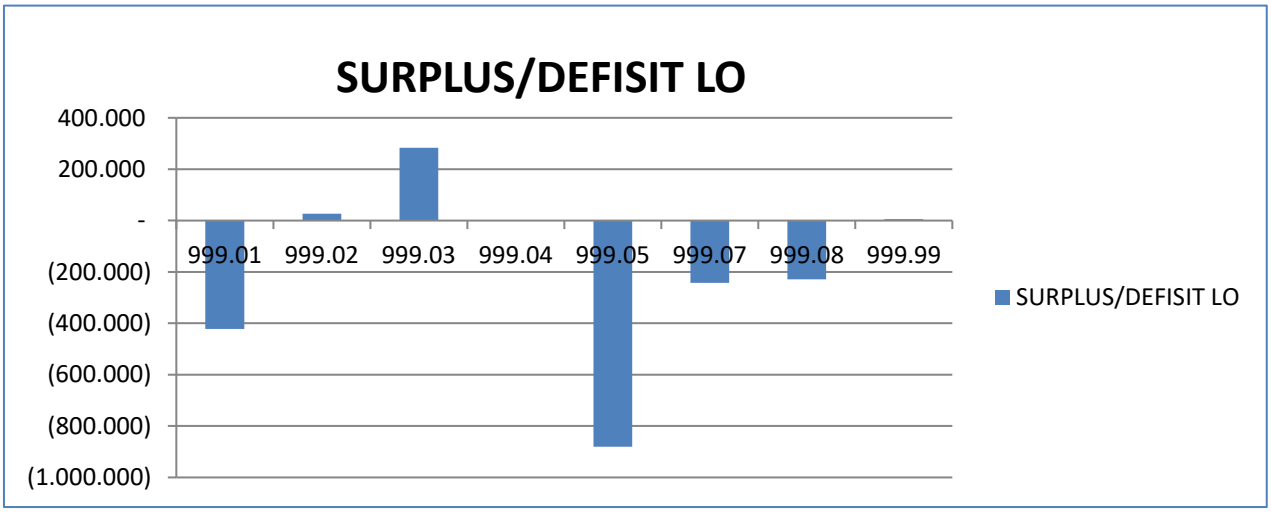

Eliminasi pada pos Surplus/Defisit tahun 2023 sebesar Rp381.732.009.962 yang merupakan beban diestimasi setoran kepada pemerintah pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (999.99)

G.2.3. KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Jumlah Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas Per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp34.506.754.444.633 dan minus Rp1.348.967.550.000 dengan rincian sebagai berikut:

KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	2023	2022
Koreksi Nilai Persediaan	59.355.000	500.000
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(4.984.035.702.940)	4.723.195.634.678
Mutasi Ekuitas Bersih UBL Bukan Satker	229.322.791.975	5.281.424.623.005
Koreksi SAL	1.498.554.940.209	9.431.660.376.686
Lain-lain	33.526.005.481.275	(25.156.564.215.892)
TOTAL	**30.269.906.865.519**	**(5.720.283.081.523)**
Eliminasi	**4.236.847.579.114**	**4.371.315.531.523**
JUMLAH	**34.506.754.444.633**	**(1.348.967.550.000)**

G.2.3.1. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp59.355.000 dan Rp500.000.

G.2.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset lainnya Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar minus Rp4.984.035.702.940 dan Rp4.723.195.634.678 dengan rincian sebagai berikut:

BA	2023	2022
999.03	50.111.283.576	141.203.754.502
999.08	3.438.474.071	126.699.307.944
999.99	(5.037.585.460.587)	4.455.292.572.232
	(4.984.035.702.940)	**4.723.195.634.678**

Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi sebesar **minus Rp4.984.035.702.940** dapat dirinci sebagai berikut:

BA	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	Koreksi Aset Lainnya Non Revaluasi	Total
999.03	-	50.111.283.576	50.111.283.576
999.08	3.437.317.071	1.157.000	3.438.474.071
999.99	-	(5.037.585.460.587)	(5.037.585.460.587)
	3.437.317.071	**(4.987.473.020.011)**	**(4.984.035.702.940)**

1. BA 999.03 sebesar Rp50.111.283.576 merupakan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi yang menambah ekuitas pada KPA Satker BLU LMAN:

Keterangan	Jumlah
Penyerahkelolaan aset dari DJKN	84.071.680.667
Penarikan aset oleh DJKN - penghentian pengakuan nilai aset	(36.845.866.111)
Penarikan aset oleh DJKN - penghentian pengakuan akumulasi penyusutan	837.633.480
Kapitalisasi nilai keterlambatan pekerjaan upgrade properti investasi	327.893.590
Pengakuan aset berlebih Ciperna	486.411.000
Penghentian pengakuan atas penghapusan sebagian Aset Kilang LNG Arun:	
- Nilai aset	(7.257.398.762)
- Akumulasi penyusutan	7.257.398.762
Penghentian pengakuan atas sebagian Aset Kilang LNG Badak:	
- Nilai aset	(38.280.051)
- Akumulasi penyusutan	38.280.051
Koreksi penyajian tahun yang lalu - properti investasi dalam pengerjaan	(14.741.482)
Koreksi akumulasi penyusutan	1.248.272.432
Total Koreksi Nilai Aset Lainnya Non-Revaluasi	**50.111.283.576**

2. BA 999.08 (Belanja Lain-Lain) sebesar Rp3.438.474.071 berasal dari:

   a. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp3.437.317.071 yang berasal dari Satker Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi sebesar Rp369.807.000 serta Satker Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp3.067.510.071;

   b. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi sebesar Rp1.157.000 yang berasal dari Satker Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi sebesar Rp1.157.000.

3. BA 999.99 sebesar minus Rp5.037.585.460.587 terdapat pada DJKN dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	UAKPABUN TK BLBI	(970.030.081.902)
2.	UAKPABUN TK PKP2B	33.741.426.823
3.	UAKPABUN TK ASET LAIN-LAIN	(449.396.004)
4.	UAKPABUN TK BMN Idle	12.702.617.731
5.	UAKPABUN TK KKKS PBMN	(19.019.106)
6.	UAKPABUN TK KKKS SKK Migas	(4.560.507.759.851)
7.	UAKPABUN TK KKKS BPMA	433.106.282.515
8.	UAKPABUN TK KKKS Dit.PKN	13.870.469.207
Total Koreksi Aset Tetap/ Lainnya Non Revaluasi		**(5.037.585.460.587)**

   a. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada UAKPABUN TK BLBI per 31 Desember 2023 sebesar minus Rp970.030.081.902 yang termasuk di dalamnya berupa hibah kepada pemerintah daerah.

   b. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada UAKPABUN TK PKP2B per 31 Desember 2023 sebesar Rp33.741.426.823 dengan rincian sebagai berikut:

      1) Koreksi tambah dari BMN Non Tanah menjadi tanah pada PT Berau Coal Sebesar Rp22.570.399.132 karena setelah dilakukan verifikasi dokumen dan cek fisik merupakan tanah dengan perolehan diatas 2010;

      2) Koreksi tambah BMN dari *off Balance* menjadi tanah pada PT Berau Coal sebesar Rp21.098.500.655 karena setelah dilakukan verifikasi dokumen dan cek fisik merupakan tanah dengan perolehan diatas 2010;

3) Koreksi tambah BMN Tanah PT KPC yang baru dilaporkan sebesar Rp3.483.000.000 terkait dengan SUTT PT PLN dengan tahun perolehan 2011 s.d 2022;

4) Koreksi tambah BMN Tanah PT KPC yang baru dilaporkan sebesar Rp5.223.829.760 terkait dengan Tanah Simpang Perdau Batu Ampar dengan tahun perolehan 2011 s.d 2022;

5) Koreksi kurang akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebesar Rp4.092.673.700;

6) Koreksi kurang akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp9.040.356.475;

7) Koreksi kurang Tanah atas reklasifikasi dari Non Tanah ke Tanah sebesar Rp5.501.272.549.

c. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada UAKPABUN TK Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 sebesar minus Rp449.396.004 yang berasal dari PSP barang gratifikasi pada KPK dan DJP dengan rincian PSP barang gratifikasi pada KPK sebesar Rp32.900.000 dan PSP barang gratifikasi pada Kementerian Keuangan c.q. DJP sebesar Rp416.496.004.

d. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada UAKPABUN TK BMN Idle per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.702.617.731 yang merupakan selisih dari nilai koreksi kurang dan koreksi tambah atas aset BMN Idle. Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023, terdapat koreksi kurang sebesar Rp814.025.143 merupakan nilai aset yang diserahkan kepada Kementerian/Lembaga berupa Tanah Idle senilai Rp803.368.000 dan Bangunan Idle senilai Rp10.657.143.

   Selain itu juga terdapat koreksi tambah yang diakui sebagai koreksi aset non-revaluasi sebesar Rp13.516.642.874 merupakan nilai aset yang diserahkan kepada Kementerian/Lembaga berupa Tanah Idle senilai Rp10.786.158.000 dan Bangunan Idle senilai Rp2.730.484.874.

e. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada UAKPABUN TK KKKS PBMN per 31 Desember 2023 sebesar minus Rp19.019.106. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset lainnya yang bukan dikarenakan hasil revaluasi. Rincian Koreksi Aset Tetap Lainnya Non Revaluasi terdiri atas :

   1) Koreksi tambah karena penambahan akumulasi penyusutan aset HBM sebesar Rp12.805.500

   2) Koreksi tambah karena penambahan akumulasi penyusutan aset HBI sebesar Rp6.213.606

f. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada UAKPABUN TK KKKS SKK Migas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar minus Rp4.560.507.759.851. Rincian Koreksi Aset Tetap Lainnya Non Revaluasi sebagai berikut:

   1) Mutasi tambah sebesar Rp14.977.965.202.431 terdiri atas:

      a) Koreksi tambah pembenahan catatan yang disebabkan ada koreksi atas saldo awal, PIS Tahun sebelumnya, transfer in, selisih pembulatan, koreksi tambah nilai perolehan sebesar Rp11.003.745.487.205;

      b) Koreksi tambah atas pengembalian (return) Material Persediaan *capital* sebesar Rp301.108.944.841;

      c) Koreksi tambah atas pengurangan akumulasi penyusutan sebesar Rp3.673.110.770.385.

   2) Mutasi kurang sebesar Rp19.538.472.962.282 terdiri atas:

      a) Koreksi kurang pembenahan pencatatan yang disebabkan ada koreksi ata saldo awal, transfer out, selisih pembulatan, koreksi kurang nilai perolehan, dan pemakaian Material Persediaan Capital sebesar Rp5.720.710.031.402:

b) Koreksi kurang atas pemakaian Material Persediaan capital sebesar Rp7.408.148.644.905;

c) Koreksi kurang atas akumulasi penyusutan sebesar Rp6.409.614.285.975.

g. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada UAKPABUN TK KKKS BPMA per 31 Desember 2023 sebesar Rp433.106.282.515 .

h. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada UAKPABUN TK KKKS Dit.PKN per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.870.469.207

G.2.3.3. Mutasi Ekuitas Bersih Badan Lainnya

Mutasi Ekuitas Bersih Badan Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp Rp229.322.791.975 dan Rp5.281.424.623.005 merupakan mutasi saldo Ekuitas pada neraca konsolidasian BUN yang berasal dari penambahan *net* aset satker Unit Badan Lainnya. Penambahan *net* aset satker UBL ini merupakan akumulasi dari kenaikan dan penurunan Ekuitas bersih UBL Bukan Satker tahun 2023 dengan kontra akun Aset Lainnya Pada Unit Badan Lainnya. Rincian penambahan *net* aset satker Unit Badan Lainnya, sebagai berikut:

NO	UBL	2023	2022
1	Otorita Asahan	-	(1.455.757.188)
2	Taman Mini Indonesia Indah	-	(64.034.860.321)
3	Yayasan Gedung Veteran	4.269.425.631	(2.326.894.868)
4	Baznas	186.721.883.181	(5.388.923.800)
5	Badan Wakaf Indonesia	6.189.776.334	3.423.218.750
6	SKK Migas	-	25.382.208.452
7	Badan Pengelola Keuangan Haji	(583.084.554.106)	3.827.905.183.164
8	Otoritas Jasa Keuangan	615.226.260.935	1.497.920.448.816
	JUMLAH	**229.322.791.975**	**5.281.424.623.005**

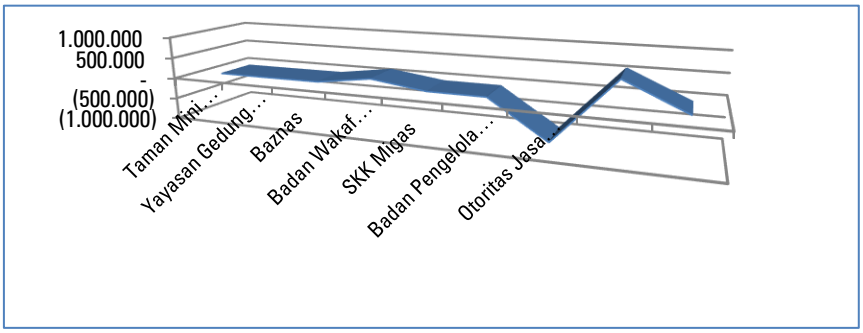

Penjelasan mutasi Ekuitas adalah sebagai berikut:

1. Mutasi Ekuitas yang berasal dari Otorita Asahan per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0. Mutasi Ekuitas sebesar Rp0 merupakan nilai Aset yang telah dilikuidasi periode 2022 *Audited* dan telah dilakukan penyusutan. Pada periode Tahun 2023 *Audited* proses likuidasi masih berjalan.
2. Mutasi Ekuitas yang berasal dari Yayasan TMII per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0. Pada periode Tahun 2023 *Audited* proses Likuidasi tahap 2 pada TMII telah menyelesaikan proses pencatatan Aset.

3. Mutasi Ekuitas yang berasal dari Yayasan Gedung Veteran Republik Indonesia (YGVRI) per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.269.425.631 yang terdiri dari:

   a. Penurunan ekuitas berasal dari defisit Laporan Operasional sebesar Rp157.598.228. Defisit Laporan Operasional Yayasan Gedung Veteran sebesar Rp157.598.228 terdiri dari pendapatan sebesar Rp6.506.820.885, dikurangi dengan beban biaya personalia sebesar Rp1.403.245.996, biaya dukungan dana ke MB-LVRI sebesar Rp4.419.810.000 dan Beban biaya administrasi dan umum sebesar Rp841.363.117;

   b. Koreksi penambahan ekuitas sebesar Rp4.427.023.859 yang berasal dari perbedaan Laporan Keuangan YGVRI pada Tahun anggaran 2022 *Audited* dengan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2022 *Audited*. Hal tersebut dikarenakan Aset Lainnya Tahun Lalu pada Yayasan Gedung Veteran dicatat berdasarkan Laporan Keuangan 2022 *Unaudited*. Penyampaian Laporan Keuangan YGVRI Tahun 2022 *Audited* dilakukan setelah masa penyusunan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2022 *Audited* berakhir.

4. Mutasi Ekuitas yang berasal dari Baznas per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp186.721.883.181. Mutasi Ekuitas sebesar Rp186.721.883.181 terdiri dari:

   a. Surplus laporan operasional pada dana zakat sebesar Rp64.385.135.548;

   b. Surplus laporan operasional dana infak sebesar Rp143.008.540.674;

   c. Surplus laporan operasional dana amil sebesar Rp2.032.431.487;

   d. Koreksi atas ekuitas Laporan Keuangan Baznas tahun anggaran yang lalu sebesar minus Rp22.704.224.528.

5. Mutasi Ekuitas yang berasal dari Badan Wakaf Indonesia per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.189.776.334 terdiri dari:

   a. Surplus dana pengelolaan APBN sebesar Rp33.842;

   b. Surplus dana pengelolaan non APBN sebesar Rp78.147.223;

   c. Defisit dana pengelolaan non kas sebesar minus Rp25.839.800;

   d. Surplus dana pengelolaan wakaf sebesar Rp4.010.145.791 ;dan

   e. Surplus dana pengelolaan operasional sebesar Rp2.127.289.278.

6. Mutasi Ekuitas yang berasal dari SKK MIGAS per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0. Mutasi Ekuitas sebesar Rp0 merupakan penurunan Ekuitas dengan rincian sebagai berikut:

PENJELASAN	JUMLAH
I. SURPLUS (DEFISIT) KINERJA BERSIH	(113.968.011.874)
II. KOREKSI EKUITAS TAHUN LALU (a - b +c)	108.185.768.892
a. Ditambah Mutasi Imbalan pasca kerja SKK Migas terdiri dari selisih imbalan pasca kerja TA 2023 dikurangi imbalan pasca kerja TA 2022	120.255.523.250
b. Dikurang Mutasi Ekuitas SKK Migas satker 999.08	12.069.754.358
c. Ditambah Penyesuaian LK 2022 *Audited* LKBL dengan SKK Migas	0
III. MUTASI PENYESUAIAN PENYAJIAN EKUITAS NEGATIF	(5.782.242.982)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS setelah penyesuaian (I + II - III)	**0**

7. Mutasi Ekuitas yang berasal dari Badan Pengelola Keuangan Haji per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar minus Rp583.084.554.106. Mutasi Ekuitas Laporan Keuangan Badan Pengelola Kegiatan Haji sebesar minus Rp583.084.554.106 dapat dirinci sebagai berikut:
   a. Surplus/defisit sebesar minus Rp594.726.509.665;
   b. Koreksi aset Neto senilai Rp8.975.419.474;
   c. Pengakuan Kepentingan Non Pengendali sebesar minus Rp865.807.104 ;dan
   d. Koreksi penambahan Ekuitas sebesar Rp3.532.343.189 yang berasal dari perbedaan Laporan Keuangan BPKH pada Tahun anggaran 2022 *Audited* dengan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2022 *Audited*. Hal tersebut dikarenakan Aset Lainnya Tahun Lalu pada BPKH dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2022 *Unaudited*. Penyampaian Laporan Keuangan BPKH Tahun 2022 *Audited* dilakukan setelah masa penyusunan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2022 *Audited* berakhir.

8. Mutasi Ekuitas yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp615.226.260.935. Mutasi Ekuitas merupakan kenaikan Ekuitas Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan setelah dilakukan penyesuaian. Mutasi Ekuitas sebesar Rp615.226.260.935 merupakan perubahan Ekuitas dari OJK sebagai satker BA 999.08. dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
a. Mutasi Ekuitas OJK Bukan Satker	606.863.900.235
b. Mutasi Ekuitas OJK satker 999.08	(8.362.360.700)
c. Penyesuaian Saldo Audited	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS setelah penyesuaian (a-b+c)	**615.226.260.935**

G.2.3.4. Koreksi SAL

Koreksi SAL sampai dengan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.498.554.940.209 dan Rp9.431.660.376.686. Koreksi SAL merupakan mutasi transaksi atas akun SILPA 311211 yang merupakan jurnal penyesuaian SILPA selisih kurs atas rekening milik BUN pada Direktorat PKN dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah berdasarkan Perdirjen Nomor 19 Tahun 2016 dan transaksi pada akun koreksi 311212 yang merupakan transaksi pengembalian pendapatan negara Tahun Anggaran Yang Lalu dengan rincian sebagai berikut:

1. Mutasi transaksi pada akun SILPA (311211) merupakan jurnal penyesuaian SILPA selisih kurs atas rekening milik BUN pada Direktorat PKN dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah berdasarkan Perdirjen Nomor 19 Tahun 2016;
2. Mutasi transaksi pada akun Koreksi pendapatan tahun anggaran yang lalu (311212) merupakan transaksi pembayaran pengembalian pendapatan negara tahun anggaran yang lalu menggunakan beban SAL, yang ditatausahakan oleh Satker Transaksi Khusus Pengembalian Penerimaan Negara atas Beban SAL (999254) pada Direktorat Sistem Perbendaharaan.

Akun	Rincian Akun	Jumlah Mutasi 2023	Jumlah Mutasi 2022
311211	SILPA	(1.603.949.124.314)	9.457.907.426.911
311212	Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang lalu	105.394.184.105	(26.247.050.225)
Jumlah		**(1.498.554.940.209)**	**9.431.660.376.686**

G.2.3.5. Lain-lain

Pos Lain-lain sampai dengan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp37.762.853.060.389 dan minus Rp20.785.248.684.369. Nilai Lain-lain sebesar Rp33.384.812.958.262 merupakan nilai koreksi lain-lain sebesar Rp29.147.965.379.148 ditambah eliminasi sebesar Rp4.236.847.579.114. Rincian nilai pos lain-lain adalah sebagai berikut:

UNIT		2023	2022
KODE	URAIAN		
999.00	Akuntansi Pusat	(34.645.896.571.039)	20.515.913.199.663
999.01	BA BUN Utang Pemerintah	(348.433.807.838)	825.169.398.659
999.02	BA BUN Hibah	1.262.041.438.199	1.037.365.564.206
999.03	BA BUN Investasi Pemerintah	31.588.223.378.734	(52.049.031.031.088)
999.04	BA BUN Pemberian Pinjaman	(147.939.140.574)	-
999.05	BA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa	8.702.029.740.761	(4.137.591.470.498)
999.07	BA BUN Belanja Subsidi	(3.592.823.821.542)	(5.708.407.644.565)
999.08	BA BUN Belanja Lain-lain	(515.642.586.752)	590.056.898.607
999.99	BA BUN Transaksi Khusus	31.224.446.851.326	13.769.960.869.124
JUMLAH		**33.526.005.481.275**	**(25.156.564.215.892)**
Penyesuaian*		**4.236.847.579.114**	**4.371.315.531.523**
Lain-lain setelah penyesuaian		**37.762.853.060.389**	**(20.785.248.684.369)**

*)Penyesuaian merupakan eliminasi atas transaksi yang sama yang disajikan pada dua BA BUN yang berbeda

Eliminasi pada pos Koreksi Lain-lain tahun 2023 yang berasal dari mutasi dana sebesar Rp4.236.847.579.114 dengan rincian sebagai berikut:

1. Mutasi yang berasal dari eliminasi dana yang dicadangkan untuk menjamin berlangsungnya proyek pembangunan pemerintah sebesar minus Rp330.511.505.000;
2. Mutasi Dana Cadangan Investasi Pemerintah PEN sebesar Rp4.847.519.139.589;
3. Mutasi pemindahbukuan PNBP panas bumi dimana sebelumnya sudah diakui sebagai beban diestimasi setoran kepada pemerintah sebesar minus Rp196.010.334.104;
4. Mutasi dana sebesar minus Rp84.149.721.371 yang merupakan dana di Rekening Penampungan-K/L dana pada Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

Pos Lain-Lain pada Laporan Perubahan Ekuitas pada prinsipnya berasal dari koreksi dan/atau penyesuaian yang menggunakan akun Ekuitas, koreksi nilai Utang pihak ketiga, reklasifikasi Utang diestimasi, pemotongan atas lebih salur-Piutang PNBP, reklasifikasi Piutang Lain-Lain.

1. Lain-Lain pada BA 999.00

Lain-Lain sebesar minus Rp34.645.896.571.039 pada 999.00 merupakan mutasi transaksi atas akun SAL 311111, dan akun ekuitas 391111 pada ledger akrual.

Akun	Rincian Akun	Jumlah Mutasi
311111	SAL	(2.804.406)
311112	Penggunaan SAL	(35.000.000.000.000)
391111	Ekuitas	354.106.233.367
Jumlah		**(34.645.896.571.039)**

2. Lain-Lain pada BA 999.01

Lain-Lain sebesar minus Rp348.433.807.838 pada 999.01 adalah Koreksi Lain-lain LPE yang merupakan penyesuaian atas nilai utang pinjaman dikarenakan adanya penyesuaian utang yang masih harus dibayar dan penyesuaian pinjaman luar negeri yang mempengaruhi ekuitas dengan rincian sebagai berikut :

Komponen Penyesuaian Ekuitas	Nominal
Utang Proyek	(495.341.454.954)
Reksus NoD 2022 Kas Diterima 2023	3.355.675.441
Refund Direct Payment	147.939.140.576
NoD 2023 belum terbit SP3	(4.387.168.901)
Total Penyesuaian	**(348.433.807.838)**

3. Lain-Lain pada BA 999.02

Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.262.041.438.199 dan Rp1.037.365.564.206. Lain-Lain sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.262.041.438.199 merupakan transaksi pengesahan Pendapatan hibah tahun Anggaran yang lalu, yang trdiri atas hibah uang sebesar Rp108.343.625.029 dan hibah barang sebesar Rp1.153.697.813.170.

4. Lain-Lain pada BA 999.03

Lain-Lain sebesar Rp31.588.223.378.734 merupakan koreksi penyesuaian Ekuitas pada satker BA 999.03 yang terdiri dari:

NO	NAMA UAKPA	Nilai
1	KPA DJPK	(36.456.899.772)
2	KPA Dit PNBP DJA	82.058.488.844.136
3	BLU LPDB KUMKM	(13.663.136.300)
4	KPA BLU LMAN	238.568.277.058
5	KPA Kementerian BUMN	(89.325.986.290.583)
6	KPA DJKN	11.983.072.486.909
7	KPA Dit SMI	1.230.333.650.980
8	KPA BP Tapera	184.251.838
9	UAIP	25.288.212.501.603
10	KPA Badan Bank Tanah	130.663.791.650
11	KPA BLU BPDLH	1.342.599.199
12	KPA Dit EAS	33.463.302.016
Jumlah		**31.588.223.378.734**

Adapun penjelasan lebih lanjut atas rincian mutasi lain-lain masing masing KPA adalah sebagai berikut:

a. Mutasi lain-lain pada KPA DJPK

Mutasi lain-lain pada KPA DJPK per 31 Desember 2023 sebesar minus Rp36.456.899.772. Dampak tersebut berasal dari jurnal penyesuaian yang dilakukan sebagai tindak lanjut atas Berita Acara Rekonsiliasi DJPK dengan PT. SMI Nomor BA189/SMI/DPPPP/DPPU-1/1223 // BA-18/SMI/DPPPP/DPPU3/1223 tanggal 18 Desember 2023.

b. Mutasi lain-lain pada KPA Dit PNBP DJA

Mutasi lain-lain pada KPA Dit PNBP DJA per 31 Desember 2023 sebesar Rp82.058.488.844.136 yang berasal dari penambahan ekuitas atas pengakuan piutang bukan pajak dari Bagian Pemerintah dari pembagian dividen secara tunai TB 2022 dengan pencatatan Metode Ekuitas saat pengumuman pembagian dividen tunai sesuai dengan RUPS sebesar Rp82.058.488.844.136.

c. Mutasi Lain-lain KPA BLU LPDB KUMKM

Mutasi lain-lain pada KPA BLU LPDB KUMKM sebesar minus Rp13.663.136.300 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Rincian Koreksi Lain-lain	Jumlah
Mutasi Tambah	**8.681.443.045**
(+) Pengalihan dari Program Kementerian Tahun 2023	7.764.585.832
(+) Pencairan Klaim Subrogasi Mitra 2023	889.374.611
(+) Koreksi Dana Bergulir Tahun Lalu	27.482.602
Mutasi Kurang	**(22.344.579.345)**
(-) Koreksi Klaim Subrogasi Mitra Tahun 2022 dan 2023	(1.750.007.897)
(-) Mutasi NRB Triwulan Tahun 2023	(9.975.380.910)
(-) Transaksi Non Kas Mitra *Crash Program*	(5.225.276.174)
(-) Transaksi Non Kas Mitra PSBDT	(2.239.769.027)
(-) Penyetoran ke Kas Negara oleh Kejaksaan atas Mitra KUD Sulahan	(3.154.145.337)
Koreksi Lain-lain	**(13.663.136.300)**

Rincian mutasi koreksi lain-lain adalah sebagai berikut:

1) Mutasi tambah terdiri dari:
   a) Pengalihan dari Program Kementerian Tahun 2023 sebesar Rp7.764.585.832 merupakan pembayaran tunai dari mitra kepada LPDB-KUMKM yang mendapatkan program dana bergulir Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2000-2007;
   b) Pencairan klaim subrogasi oleh Jamkrida Jawa Tengah sebesar Rp889.374.611 terdiri atas mitra KSU Monjari sebesar Rp348.412.800, BMT Bina Umat Mulia sebesar Rp140.961.811, dan Koperasi Produsen Cahaya Multi Indonesia sebesar Rp400.000.000; dan
   c) Koreksi dana bergulir tahun lalu sebesar Rp27.482.602 yang merupakan koreksi dana bergulir pada periode tahun-tahun sebelumnya.
2) Mutasi kurang terdiri dari:
   a) Koreksi reklasifikasi dari ekuitas menjadi utang jangka panjang lainnya atas pencairan klaim subrogasi mitra pada tahun 2022 sebesar Rp860.633.285 dan pencairan klaim subrogasi mitra tahun 2023 sebesar Rp889.374.612;
   b) Mutasi NRB tahun 2023 sebesar Rp9.975.380.910 yang berasal dari Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan surat Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM nomor B-55/SM/KU.02.00/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 hal Nilai Realisasi Bersih (NRB) Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan UKM Periode 31 Desember 2023 dan hasil rekonsiliasi antara LPDB-KUMKM dengan Kementerian Koperasi dan UKM pada rapat tanggal 9-12 Januari 2024;
   c) Transaksi non kas mitra *Crash Program* berdasarkan PMK nomor 13/PMK.06/2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia

Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.225.276.174 yang merupakan penghapusbukuan sisa nilai piutang mitra setelah dikurangi dengan realisasi pembayaran mitra atas *Crash Program;*

d) Transaksi non kas mitra PSBDT sebesar Rp2.239.769.027 yang merupakan transaksi non kas atas mitra PSBDT;

e) Penyetoran ke kas negara oleh Kejaksaan atas mitra KUD Sulahan sebesar Rp3.154.145.337 yang merupakan uang pengganti tindak pidana korupsi oleh pengurus KUD Sulahan sesuai Surat Pengantar Kejaksaan Negeri Bangli Nomor: TAR-1346/N.1.13/Ft.1/07/2022 tanggal 12 Juli 2022.

d. Mutasi lain-lain pada KPA BLU LMAN

Mutasi lain-lain pada KPA BLU LMAN sebesar Rp238.568.277.058 merupakan koreksi yang menambah ekuitas yang berasal dari:

1) Selisih tambah penilaian wajar aset Gedung AA Maramis Rp198.938.851.999;
2) Koreksi kurang aset kelolaan atas lebih saji selisih tambah penilaian tahun lalu Rp7.804.472.074;
3) Retur dana jangka panjang atas transaksi sebelum 2023 Rp745.992.053 dan;
4) Selisih lebih (capital gain) penilaian pertama kali atas properti investasi Rp46.687.905.080.

e. Mutasi lain-lain pada KPA Kementerian BUMN

Mutasi Lain pada KPA Kementerian BUMN pada 31 Desember 2023 sebesar minus Rp89.325.986.290.583 yang terdiri dari ILKPN sebesar minus Rp81.847.508.227.060 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Pemerintah PEN sebesar minus Rp800.000.000.000, Dana Lainnya sebesar minus Rp3.000.000.000.000, Pencairan Investasi Pemerintah Non Permanen pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar minus Rp1.047.519.139.000, Penyesuaian Transaksi PMPP sebesar minus Rp2.630.958.924.696, dan selisih sebesar Rp173 merupakan pembulatan. Mutasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1) Mutasi lain-lain yang berasal dari ILKPN dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO	Perusahaan	Nilai
1	Perusahaan Umum (Perum)	1.171.665.744.770
2	Perseroan (Persero)	(82.980.683.946.947)
3	Minoritas/Non BUMN	(38.490.024.883)
Jumlah		**(81.847.508.227.060)**

Selanjutnya Rincian mutasi dari masing masing BUMN Persero, Perum dan Minoritas dapat dirinci sebagai berikut :

a) Perusahaan Umum (Perum)
Rincian mutasi lain-lain sebesar Rp1.171.665.744.770 adalah sebagai berikut :

NO	Uraian	Jumlah Rp	
1	OCI Reval		98.385.498.262
2	OCI Non Reval		(249.791.021.638)
3	Dividen		(100.000.000.000)
4	Mutasi BPYBDS		
5	PKBL		
6	Selisih dijelaskan terdiri dari		
	a. Selisih karena Treasury Stock/ESOP		
	b. Selisih saldo awal	(13.942.524.828)	
	c. Selisih Restatement	(1.632.275.119)	
	c. Selisih Pencatatan Dividen	-	
	d. Selisih Pencatatan tambahan modal disetor	1.745.095.163.588	
	f. Selisih kurs penjabaran Lap Keuangan		
	g. Penihilan Ekuitas Negatif	(2.711.666.470)	
	h. Selisih karena Komponen LPE Lain	(303.737.429.025)	
	Jumlah (a s.d h)		1.423.071.268.146
7	Saldo Akhir (1+2+3)		1.171.665.744.770

b) Perseroan (Persero)

Rincian mutasi lain-lain sebesar minus Rp82.980.683.946.947 adalah sebagai berikut :

No		Uraian	Jumlah Rp	
1		OCI Reval		232.594.397.623
2		OCI Non Reval		6.220.477.988.544
3		Dividen		(81.109.261.569.987)
4		Mutasi BPYBDS		(21.012.479.000)
5		PKBL		
6		Selisih dijelaskan terdiri dari:		
	a	Selisih karena Treasury Stock/(ESOP)	(526.608.393.000)	
	b	Selisih saldo awal	(2.058.853.797.282)	
	c	Selisih Restatement	(3.552.707.573.719)	
	d	Selisih Pencatatan Dividen	(2.560.737.015.750)	
	e	Selisih Pencatatan tambahan modal disetor	16.241.301.073.854	
	f	Selisih Kurs Penjabaran Lap Keuangan	(4.592.977.514.000)	
	g	Penihilan Ekuitas Negatif	(1.667.021.489)	
	h	Selisih karena Komponen LPE Lain	(11.251.232.042.740)	
	j	Selisih karena pembulatan excel	(1)	
		Jumlah (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j)		(8.303.482.284.126)
7		Saldo akhir (1+2+3+4+5+6)		(82.980.683.946.947)

c) Minoritas

Rincian mutasi lain-lain sebesar minus Rp38.490.024.883 adalah sebagai berikut :

No		Uraian	Jumlah Rp	
1		OCI Reval		
2		OCI Non Reval		-
3		Dividen		
4		Mutasi BPYBDS		
5		PKBL		
6		Selisih dijelaskan terdiri dari:		
	a	Selisih karena Treasury Stock/(ESOP)		
	b	Selisih saldo awal	946.239.000.000	
	c	Selisih Restatement		
	d	Selisih Pencatatan Dividen		
	e	Selisih Pencatatan tambahan modal disetor		
	f	Selisih Kurs Penjabaran Lap Keuangan	(13.377.000.000)	
	g	Penihilan Ekuitas Negatif		
	h	Selisih karena Komponen LPE Lain	(971.352.024.883)	
	j	Selisih karena pembulatan excel		
		Jumlah (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j)		(38.490.024.883)
7		Saldo akhir (1+2+3+4+5+6)		(38.490.024.883)

f. Mutasi Lain-lain pada KPA DJKN

Mutasi Lain pada KPA DJKN periode *Audited* 2023 sebesar Rp11.983.072.486.909 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1.	Bagian Ekuitas non laba bersih pada PT SMI (Persero):	
	a. Dividen	(595.100.000.000)
	b. Pendapatan/Beban komprehensif lainnya	238.952.697.521
	c. Selisih karena komponen LPE lain	(8.255.376.531)
	Total	**(364.402.679.010)**
2.	Bagian Ekuitas non laba bersih pada PT PII (Persero):	
	a. Dividen	(142.834.725.000)
	b. Pendapatan/Beban komprehensif lainnya	116.344.837.000
	Total	**(26.489.888.000)**
3.	Bagian Ekuitas non laba bersih pada PT SMF (Persero)	
	a. Dividen	(83.537.000.000)
	b. Pendapatan/Beban komprehensif lainnya	(1.447.000.000)
	Total	**(84.984.000.000)**
4.	Bagian Ekuitas non laba bersih pada PT GDE (Persero)	
	a. Dividen	(15.027.872.800)
	b. Pendapatan/Beban komprehensif lainnya	(6.273.866.504)
	Total	**(21.301.739.304)**
5.	Bagian Ekuitas non laba bersih pada PT TPI	
	a. Pendapatan/Beban komprehensif lainnya	(12.761.206.777)
	Total	**(12.761.206.777)**
6.	Bagian Ekuitas non laba bersih pada LPEI:	
	a. Pendapatan/Beban komprehensif lainnya	7.549.000.000
	Total	**7.549.000.000**
7.	Bagian Ekuitas non laba bersih pada LPI:	
	a. Pendapatan/Beban komprehensif lainnya	12.485.463.000.000
	Total	**12.485.463.000.000**
	TOTAL	**11.983.072.486.909**

g. Mutasi Lain-lain pada KPA Dit. SMI

Mutasi Lain pada KPA Dit SMI DJPb pada tahun 2023 sebesar Rp1.230.333.650.980 berasal dari kenaikan nilai investasi non permanen BLU PIP. Mutasi Lain sebesar Rp1.230.333.650.980 berasal dari penurunan nilai investasi nonpermanen BLU PIP sebesar minus Rp7.171.349.020 dan koreksi atas reklasifikasi SUN kategori HTM dari Investasi Jangka Pendek menjadi Investasi Jangka Panjang pada BPDPKS sebesar Rp1.237.505.000.000

h. Mutasi Lain-lain pada KPA BP Tapera

Mutasi Lain pada KPA Dit SMI DJPb pada tahun 2023 sebesar Rp184.251.838 merupakan hasil pengukuran kembali liabilitas (aset) atas imbalan pasca kerja pasti neto yang diakui langsung di penghasilan komprehensif lain

i. Mutasi Lain-lain pada KPA UAIP

Mutasi Lain pada UAIP tahun 2023 sebesar Rp25.288.212.501.603. Mutasi lain-lain terdiri dari Mutasi dari Pendapatan/(Beban) Komprehensif Lainnya berdasarkan ILKPN pada LPS, BI, PTNBH, dan BPJS dan Koreksi saldo awal PTNBH. Rincian mutasi lain-lain satker UAIP adalah sebagai berikut :

No	Uraian Mutasi	Nilai
1	Pendapatan/(Beban) Komprehensif Lainnya berdasarkan ILKPN pada LPS, BI, PTNBH, dan BPJS	15.797.420.958.840
2	Pendapatan Hibah	17.535.017.303
3	Koreksi ekuitas – saldo awal	9.496.058.647.145
4	Koreksi ekuitas lainnya	(22.802.121.685)
Jumlah		**25.288.212.501.603**

1) Mutasi dari Pendapatan/(Beban) Komprehensif Lainnya sebagai berikut:

Uraian Mutasi	Nilai (Rp)
Lembaga Penjamin Simpanan	(15.916.819.000)
Bank Indonesia	16.371.175.000.000
Institut Pertanian Bogor*	(243.602.470)
Universitas Airlangga	(413.922.270)
Institut Teknologi Bandung	2.055.188.847
Universitas Indonesia	(344.018.982)
Universitas Gadjah Mada	1.761.698.841
Universitas Sumatera Utara	(1.246.962.061)
Universitas Padjajaran	(841.053.580)
Universitas Diponegoro*	396.644.559
Institut Teknologi Sepuluh November	50.685.111
Universitas Negeri Malang	20.775.892
Universitas Terbuka*	22.896.977.127
BPJS Kesehatan	(60.336.143.859)
BPJS Ketenagakerjaan	(521.593.489.315)
Total	**15.797.420.958.840**

2) Mutasi dari Pendapatan Hibah sebesar Rp17.535.017.303 pada Universitas Negeri Padang
3) Mutasi dari koreksi awal sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal LK UAIP 2022 Audited (A)	Saldo Awal Seharusnya (B)
UIN Sumatera Utara	2.320.860.646	1.415.810.000
Institut Pertanian Bogor	2.795.117.983.603	2.794.015.872.518
Universitas Pendidikan Indonesia	1.052.744.544.568	1.047.294.002.655
Universitas Diponegoro	3.651.496.953.823	3.663.430.350.827
Institut Teknologi Sepuluh November	1.660.405.319.649	1.650.796.377.185
Universitas Negeri Sebelas Maret	1.686.700.442.024	1.686.961.044.623
Universitas Andalas	1.241.583.274.047	1.224.307.818.361
Universitas Syiah Kuala	-	1.532.599.687.465
Universitas Terbuka	-	3.552.533.805.610
Universitas Negeri Surabaya	-	1.677.983.220.365
Universitas Negeri Yogyakarta	-	1.373.142.652.142
Universitas Negeri Semarang	-	1.708.859.618.819
BPJS Ketenagakerjaan	12.821.208.513.150	12.494.296.278.085
Total	24.911.577.891.510	34.407.636.538.655
Total Koreksi (B-A)	**Rp9.496.058.647.145 (*understated*)**	

Koreksi dilakukan sebagai dampak adanya pembaharuan data laporan keuangan pada UIN Sumatera Utara, Institut Pertanian Bogor, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Negeri Sebelas Maret, Universitas Andalas, dan BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, terdapat lima PTNBH baru yang ditetapkan Nilai Kekayaan Awalnya pada tahun 2023 sehingga menambah nilai ekuitas pada Laporan Keuangan BUN BA 999.03 lingkup UAIP periode 2023 *Audited.*

4) Mutasi dari koreksi ekuitas sebagai berikut:
Secara keseluruhan, koreksi ekuitas yang tercatat pada Laporan Keuangan BUN BA 999.03 lingkup UAIP Periode 2023 *Audited* adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Koreksi Ekuitas
Investasi Nonpermanen pada Kementerian Perindustrian	(36)
Penyisihan Piutang Tak Tertagih Investasi SKIM-2 Kementerian Perindustrian	36
Universitas Negeri Sebelas Maret	(7.371.671.381)
Universitas Sumatera Utara	2.985.110.899
Universitas Brawijaya	16.990.418.610
Universitas Padjajaran	(191.405.551)
Universitas Negeri Padang	(3.846.379.288)
Universitas Syiah Kuala	(18.133.591.994)
Aset Lain-lain	(13.234.602.981)
Total Koreksi Ekuitas	**(22.802.121.686)**

Penjelasan mengenai koreksi ekuitas pada masing-masing komponen akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Kementerian Perindustrian
Pada Kementerian Perindustrian juga terdapat koreksi ekuitas sebesar Rp0 yang berasal dari koreksi kurang sebesar Rp36 atas nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya – Kementerian Perindustrian dan koreksi tambah Rp36 atas penyisihan nilai investasi dalam Investasi Non Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Yang Diragukan Realisasinya. Kelebihan nilai investasi sebesar Rp36 tersebut merupakan akumulasi sisa saldo pinjaman di bawah Rp50 dan saldo pinjaman bernilai negatif yang sudah tidak tercatat oleh Lembaga Pengelola Program (PT PNM dan BSM).

b) Universitas Brawijaya
Universitas Brawijaya melakukan koreksi atas pendapatan dan beban tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai Koreksi (Rp)
Koreksi Pencatatan pada Aset Neto Tanpa Pembatasan	22.578.633.819
Koreksi Pencatatan pada Aset Neto Dengan Pembatasan	(5.588.215.209)
TOTAL	**16.990.418.610**

c) Universitas Negeri Sebelas Maret, Universitas Sumatera Utara, Universitas Padjajaran, Universitas Negeri Padang, dan Universitas Syiah Kuala
Terdapat koreksi saldo pada kelima entitas dengan total koreksi sebesar minus Rp26.557.937.315.

d) Aset Lain-Lain

Uraian	Nilai Per 31 Desember 2023 (A)	Nilai Per 31 Desember 2022 (B)
Koreksi Ekuitas Aset Lain-lain	-	13.234.602.981
Total Koreksi (B-A)		13.234.602.981

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor BA-26/KN.3/2023 dan BAST-KPB.1794/DJPT.1/PL.450/XII/2023, telah dilaksanakan pemindahbukuan Aset Lain-Lain BUN berupa Aset eks Dana Bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dari

Laporan Keuangan BUN BA 999.03 Lingkup UAIP kepada Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (BA 032) tingkat UAKPA Sekretariat DJPT mulai periode pelaporan Tahun 2023 *Unaudited*.

j. Mutasi lain-lain pada KPA Badan Bank Tanah

Mutasi Lain pada KPA Badan Bank Tanah periode *Audited* 2023 sebesar Rp130.663.791.650 merupakan dampak kumulatif perubahan kebijakan dalam pos lain-lain.

k. Mutasi lain-lain pada KPA BLU BPDLH

Mutasi Lain pada KPA BLU BPDLH sebesar Rp1.342.599.199 berasal dari pengembalian pinjaman dari Debitur selama tahun 2023 yang diakui sebagai pokok atas Dana DNS.

l. KPA Dit. EAS

Mutasi Lain pada KPA Dit EAS sebesar Rp33.463.302.016 berasal dari berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan-kesalahan mendasar yang merupakan penyesuaian atas Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Loss Limit untuk pelaku usaha UMKM yang kasnya diterima tahun 2023, namun sebenernya merupakan hak Pemerintah pada Tahun 2022.

Penyesuaian atas transaksi ini mempengaruhi ekuitas karena pada Tahun 2022 Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Loss Limit untuk pelaku usaha UMKM secara akrual diakui saat kasnya diterima, namun pada Tahun 2023 sesuai rekomendasi BPK, dilakukan penyesuaian kebijakan bahwa secara akrual Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Loss Limit untuk pelaku usaha UMKM diakui saat hak Pemerintah muncul yakni saat pembayaran subsidi IJP (tanggal dokumen SP2D).

Adapun pembayaran Subsidi IJP untuk transaksi ini dilaksanakan pada 22 Desember 2022 untuk Pelaku Usaha UMKM PT. Jamkrindo periode II November 2021, Periode III November 2020 dan PT. Askrindo periode II November 2021, Periode III November 2020 dan Periode Restrukturisasi berdasar SP2D nomor 220191301062688 dan 220191301062686 yang mana akan jatuh tempo pembayaran PNBP-nya maksimal 15 hari kerja setelah diterimanya pembayaran subsidi IJP (tanggal dokumen SP2D). Atas pembayaran subsidi IJP tersebut, setoran PNBP-nya diterima pada Januari Tahun 2023 senilai Rp16.273.708.774 dari PT. Jamkrindo dan Rp17.189.593.242 dari PT. Askrindo.

5. Lain-Lain pada BA 999.04

Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar pada 31 Desember Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar minus Rp147.939.140.574. Hal tersebut terjadi karena adanya pengembalian dana/penarikan pinjaman yang dilakukan oleh PT SMI langsung kepada *lender*, sehingga sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2017 tentang Perlakuan Akuntansi terkait Pencatatan Akuntansi terkait Pencatatan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri perlu dilakukan pencatatan pengurangan saldo piutang penerusan pinjaman luar negeri sebesar nilai penjabaran dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dengan rincian sebagai berikut :

No	Debitur	No. SLA	Nilai Valas	Tanggal Valuta	Nilai Rupiah
1	PT. SMI	SLA-1267/DSMI/2017	USD4.986.152,36	12 Mei 2023	Rp73.969.570.288
2	PT. SMI	SLA-1266/DSMI/2017	USD4.844.757,93	14 Juni 2023	Rp73.969.570.286
Total			**USD9.830.910,29**		**Rp147.939.140.574**

6. Lain-Lain pada BA 999.05

Lain-Lain pada BA 999.05 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar **Rp8.702.029.740.761** yang berasal dari mutasi piutang dan utang pada transfer ke daerah dan dana desa. Jumlah Koreksi Lain-lain sebesar Rp8.702.029.740.761 pada setiap jenis TKD terdiri dari:

a. DAK sebesar minus Rp241.632.368.208

Lain-lain sebesar minus Rp241.632.368.208 yang merupakan saldo penyesuaian Piutang dan Utang DAK Nonfisik TA 2023 *Audited* serta koreksi lain-lain atas penyelesaian Piutang BOK tambahan, BOP PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan melalui penyaluran DAU Tahun Anggaran 2023 dan Pemindahan Saldo Piutang. Penyesuaian tersebut dilaksanakan sehubungan dengan adanya informasi perubahan sisa dana dan kurang salur DAK Nonfisik TAYL berdasarkan nota dinas informasi sisa dana dan kurang salur dari Subdit Teknis.

b. Dana Transfer Umum sebesar minus Rp34.578.279.561.971

Lain-lain sebesar minus Rp34.578.279.561.971 merupakan penyesuaian, reklasifikasi dan/atau koreksi terhadap nilai akun aset dan kewajiban di Neraca dan/atau nilai akun pendapatan-LO dan beban yang dilakukan secara jurnal penyesuaian manual dengan melibatkan akun ekuitas yang berdampak kepada penyajian nilai ekuitas.

c. Dana Transfer Khusus sebesar Rp3.059.989.894.594

Lain-lain sebesar Rp3.059.989.894.594 merupakan angka selisih antara nilai estimasi dengan nilai yang telah ditetapkan/definitive.

d. Dana Transfer Keistimewaan sebesar Rp2.188.819.277

Lain-lain sebesar Rp2.188.819.277 merupakan angka selisih antara nilai estimasi dengan nilai yang telah ditetapkan/definitif.

e. Dana Transfer Lainnya sebesar Rp40.459.762.957.069

Lain-lain sebesar Rp40.459.762.957.069 merupakan angka selisih antara nilai estimasi dengan nilai yang telah ditetapkan/definitif.

7. Lain-Lain pada BA 999.07

Lain-Lain pada BA 999.07 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar **minus Rp3.592.823.821.542** Koreksi Lain-Lain tersebut terdapat pada 4 (empat) Kementerian Negara/Lembaga, yaitu sebagai berikut:

No	Kementerian/Lembaga	Jumlah
1	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	176.128.689
2	KUKM	(971.838.025.678)
3	Pertanian	678.985.110
4	Keuangan	(2.621.840.909.663)
	Total	**(3.592.823.821.542)**

a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jumlah Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp176.128.689**. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi Lainnya terdapat pada Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum sebesar Rp164.541.486 yang merupakan temuan pemeriksaan yaitu terjadi lebih bayar pada 34 debitur sebesar Rp233.715.229 yang di TA 2022 dan Ditjen Cipta Karya sebesar Rp11.587.203 yang merupakan selisih antara utang subsidi estimasi bulan September

– Desember 2022 dikurangi dengan nilai real pencairan SP2D di bulan April 2023 atas utang estimasi tersebut:

Uraian/PDAM	Utang Subsidi Estimasi	Realisasi Real SP2D	Selisih
Kota Banjarmasin	25.882.353	16.985.294	8.897.059
Kota Denpasar	88.762.316	88.616.566	145.750
Kota Palopo	76.003.398	76.138.523	(135.125)
Kab. Cilacap	49.770.128	49.770.128	-
Giri Menang	130.272.921	129.916.009	356.912
Kab Banymuas	63.776.498	61.453.891	2.322.607
Jumlah Belanja	**434.467.614**	**422.880.411**	**11.587.203**

b. Kementerian Koperasi dan UKM

Koreksi sebesar minus Rp971.838.025.678 merupakan pembayaran subsidi bunga/subsidi marjin KUR yang sebelumnya tidak dicatat sebagai utang subsidi tahun 2022 dikarenakan belum selesainya penagihan dari penyalur.

c. Kementerian Pertanian

Jumlah Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah senilai Rp678.985.110. Koreksi Lain-lain berasal dari Berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi pada tanggal 14 Desember 2023 menyatakan hasil perhitungan Kurang Bayar TA. 2022 pada PT. Petrokimia Gresik. senilai Rp678.985.110.

d. Kementerian Keuangan

Jumlah Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2023 pada Kementerian Keuangan sebesar minus Rp2.621.840.909.663 terdapat pada Direktorat Jenderal Pajak,Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Koreksi Lain-lain sebesar minus Rp2.621.840.909.663 merupakan tagihan subsidi P-DTP yang tidak dapat dibebankan di Tahun 2023. Selain itu pada pemeriksaan LKBUN 2023 terdapat Koreksi atas penyajian beban TA 2023 yang merupakan selisih penagihan subsidi bunga pinjaman daerah (DJPK) antara proyeksi dengan realisasi TW-4 TA 2022 sebesar Rp25.887.965 dan tambahan tagihan triwulan IV akibat kekurangan SBP PT PGE Tahun 2019 - 2020 (DJP) berdasarkan audit BPKP sebesar Rp1.416.607.984.

Selain itu, terdapat koreksi pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebesar Rp2.288.219 yang merupakan koreksi atas beban subsidi peternakan tahun 2023 yang belum dibayarkan

Selain nilai di atas, terdapat tagihan belanja subsidi P-DTP reguler yang tidak dapat dibebankan di Tahun 2023 yaitu tagihan belanja subsidi PPh DTP Panas Bumi triwulan IV Tahun 2022 sebesar Rp596.620.440.290.

Selanjutnya terdapat pula tagihan belanja subsidi P-DTP terkait program PC-PEN yang tidak dapat dibebankan di Tahun 2023, yang meliputi tagihan belanja subsidi PPh DTP Pasal 21 Tahun 2021 sebesar Rp505.135.640.947, PPh Final DTP WP P3-TGAI Tahun 2021 sebesar Rp124.800.000, PPh Final DTP UMKM Tahun 2021 sebesar Rp99.074.028.856, PPN DTP Non-Vaksin Tahun 2021 sebesar Rp282.250.406.149, PPN DTP Rumah Tapak dan Rumah Susun Tahun 2021 sebesar Rp279.002.027.085, PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Tahun 2021 sebesar Rp22.220.203.397, PPN DTP Vaksin Tahun 2021 sebesar Rp778.934.788.520, dan PPN DTP Non-Vaksin Tahun 2022 sebesar Rp57.033.790.251.

8. Lain-Lain pada BA 999.08

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar minus Rp515.642.586.752. Koreksi sebesar minus Rp515.642.586.752 dirinci sebagai berikut :

a. Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja sebesar minus Rp30.650.636.967 yang merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas piutang dan utang sebesar minus Rp30.650.636.967;

b. Satker Dana Kompensasi sebesar minus Rp569.203.082.685. Jumlah tersebut merupakan :

   1) koreksi lainnya atas hasil audit BPK RI atas Kurang Bayar Dana Kompensasi Selisih Harga Jual Eceran (HJE) BBM Tahun 2021 kepada PT Pertamina Patra Niaga sebesar Rp576.941.769.589 yang terdiri atas :

      a) koreksi kompensasi BBM Premium Jamali 2021 sebesar Rp574.993.620.400 ;

      b) BBM Premium Eks Pertalite 2021 sebesar Rp1.948.149.189.

   2) serta set off atas kelebihan pembayaran Kompensasi JBT Minyak Solar Tahun 2021 sebesar Rp7.738.686.904.

c. Satker DKPBPB Batam sebesar Rp97.000. koreksi tersebut merupakan koreksi pencatatan pada BP Tanjungpinang berupa Reklas Keluar dari Aset menjadi Persediaan.dan koreksi ekuitas sebesar Rp97.000 .

d. Satker Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo sebesar Rp61.314.529 yang merupakan Koreksi kurang atas pelunasan piutang TA 2022 yang kelebihan pembayaran TW4 2022, seharusnya pelunasannya tidak diakui pendapatan LO di 2023.

e. Dana yang berasal dari rekening penampungan akhir tahun (RPATA) sebesar Rp84.149.721.371 terdiri dari :

   1) Satker SKK Migas sebesar Rp33.399.325.248;
   2) Satker Pengelola Dana OAB Papua dan Papua Barat masing-masing sebesar Rp30.788.176.761 dan Rp14.216.446.000;
   3) Satker MPPKP sebesar Rp5.745.773.362.

9. Lain-Lain pada BA 999.99

Koreksi Lain-lain terdapat pada UAPBUN TK DJPb, UAPBUN TK DJKN, UAPBUN TK DJA dan UAPBUN TK BKF. Jumlah Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp31.224.446.851.326 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	UAPBUN TK DJPb	37.270.922.232.041
2	UAPBUN TK DJKN	7.342.838.894.595
3	UAPBUN TKDJA	(13.389.316.962.828)
4	UAPBUN TK BKF	2.687.518
Total		**31.224.446.851.326**

a. Koreksi Lain-Lain pada UAPBUN TK DJPB

Koreksi-Koreksi Yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas pada UAPBUN TK DJPB sebesar Rp37.270.922.232.041 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1	UAKPABUN TK PENSIUN	2.270.922.232.041
2	UAKPABUN TK DIT. PKN	35.000.000.000.000
Total		**37.270.922.232.041**

Koreksi Lain-lain terdapat pada UAPBUN TK DJPb untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp37.270.922.232.041 berasal dari :

1) Satker Pengelola Dana Pensiun, Asuransi Kesehatan dan Program Tunjangan Hari Tua sebesar Rp2.270.922.232.041, dengan rincian sebagai berikut :
   a) Penjurnalan Piutang Tak Tertagih TA. 2022 sebesar Rp658.311.314;
   b) Piutang rampung IJP Tahun 2022 sebesar Rp148.000;
   c) Pembayaran UPSL PT Asabri (Persero) sebesar Rp2.270.263.772.727.
2) Direktorat Pengelolaan Kas Negara Transaksi Khusus sebesar Rp35.000.000.000.000 yang merupakan selisih mutasi atas transaksi Penggunaan SAL (311112) dan transaksi Penggunaan SAL *Earmark* (311113).

b. Koreksi Lain-Lain pada UAPBUN TK DJKN

Koreksi Lain-lain terdapat pada UAPBUN TK DJKN untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar **Rp7.342.838.894.595** berasal dari:

1) UAKPA BUN TK BLBI sebesar Rp4.532.340.327.850;
2) UAKPABUN TK Eks Pertamina sebesar Rp2.749.850.239.500 yang merupakan hasil dari Inventarisasi dan Penilaian tahun 2023;
3) UAKPABUN TK PKP2B sebesar Rp5.151.631.695. Koreksi ini berasal dari PNBP atas pemanfaatan BMN PKP2B PT Kaltim Prima Coal oleh Bayan Resources yang belum diakui pada tahun anggaran 2022 senilai Rp3.453.523.000 dan koreksi kurang pendapatan diterima dimuka atas sewa pada PT Kendilo Coal Indonesia yang tidak ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa serta angsuran uang muka tidak dapat dikembalikan kepada PT KCI sesuai dengan surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara nomor S-1799/KN.4/2023 tanggal 17 Oktober 2023 sebesar Rp1.698.108.695;
4) UAKPABUN TK ASET Lain-lain sebesar Rp57.069.130.791. Koreksi lain-lain sebesar Rp57.069.130.791 merupakan nilai dari Pembayaran Koreksi Biaya Pengelolaan/Pengolahan Kilang LPG eks PT TLI Periode Juli 2020-Desember 2022 sebagai Tindak Lanjut Hasil Audit BPKP sebesar Rp56.661.855.791, akumulasi penyusutan aset GIZ yang telah dilakukan pemindahtanganan sebesar Rp406.800.000 dan nilai penerimaan barang gratifikasi dari KPK tahun 2022 yang dicatat pada tahun 2023 sebesar Rp475.000;
5) UAKPA BUN TK Pengelola ABMA/T sebesar Rp5.018.322.000 dengan rincian sebagai berikut :
   a) ABMA/T Yayasan Pendidikan Bakti Jebus (d.h SD/SMP Bhakti di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-231/MK.6/2023 tanggal 5 Maret 2023 dengan nilai wajar aset sebesar Rp1.363.922.000;
   b) ABMA/T Yayasan Pendidikan Swadaya Pangkalpinang (d.h SD/SMP/SMA Swadaya Pangkalpinang) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Surat Menteri Keuangan

Nomor S-299/MK.6/2023 tanggal 20 Maret 2023 dengan nilai wajar aset sebesar Rp3.068.785.000;

c) ABMA/T Klenteng Budhi Bandar Tinggi (d.h Klenteng) di Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-304/MK.6/2023 tanggal 21 Maret 2023 dengan nilai wajar aset sebesar Rp31.528.000;

d) ABMA/T Tempat Tinggal Suriansyah (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-360/MK.6/2023 tanggal 14 Mei 2023 dan S-368/MK.6/2023 tanggal 05 Juni 2023 dengan nilai wajar aset sebesar Rp120.453.000;

e) ABMA/T Tempat Tinggal SJ Asthary PK (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-432/MK.6/2023 tanggal 4 Juli 2023 dengan nilai wajar aset sebesar Rp113.357.000;

f) ABMA/T Tempat Tinggal S Prawirawidjaja/Subianto (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-433/MK.6/2023 tanggal 4 Juli 2023 dengan nilai wajar aset sebesar Rp113.357.000;

g) ABMA/T Tempat Tinggal Hartani Bakti (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-434/MK.6/2023 tanggal 4 Juli 2023 dengan nilai wajar aset sebesar Rp98.135.000;

h) ABMA/T Tempat Tinggal H.M Syakhril (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-479/MK.6/2023 tanggal 6 Juli 2023 dengan nilai wajar aset sebesar Rp108.785.000;

6) UAKPA BUN TK BMN idle sebesar minus Rp23.000.000 yang merupakan koreksi atas pengakuan Pendapatan atas Pengelolaan BMN idle di Pengelola Barang yang berdampak pada berkurangnya nilai ekuitas sebesar minus Rp23.000.000.

7) UAKPA BUN TK BMN Hulu Migas pada SKK Migas sebesar minus Rp10.468.414. Rincian koreksi lain-lain sebagai berikut :
   a) Mutasi tambah sebesar Rp10.468.414 disebabkan atas adanya koreksi tambah ;
   b) Mutasi kurang sebesar Rp0.

8) UAKPA BUN TK BMN Hulu Migas pada BPMA sebesar minus Rp269.888.827;

9) UAKPA BUN TK Pengelola Piutang kepada Yayasan Supersemar sebesar minus Rp6.287.400.000 yang merupakan penurunan nilai aset sitaan Yayasan Supersemar yang dinilai ulang per 30 November 2023.

c. Koreksi Lain-Lain pada UAPBUN TK DJA

Koreksi Lain-lain terdapat pada UAPBUN TK DJA untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar minus Rp13.389.316.962.828 merupakan Beban Operasional sektor hulu migas dan panas bumi.

1) Koreksi Lain-Lain dari Sektor Migas sebesar minus Rp13.940.280.196.721, seluruhnya berasal dari Koreksi Lain-lain dari Kegiatan Usaha Hulu Migas, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian Koreksi Lain-lain	TA 2023
Koreksi Pendapatan tahun lalu	**(2.282.685.579.725)**
-koreksi pendapatan minyak bumi	(11.353.237.376)
-koreksi saldo awal piutang minyak valas	71.255
-koreksi Pendapatan gas bumu tahun sebelumnya	(2.745.254.404.043)
-koreksi estimasi *overlifting* KKKS tahun sebelumnya	473.924.057.196
-koreksi pendapatan dimuka atas jasa pandu dan jasa tunda	(2.066.757)

Uraian Koreksi Lain-lain	TA 2023
Koreksi Beban Tahun lalu	**(11.657.594.616.996)**
-koreksi estimasi beban *underlifting* KKKS tahun sebelumnya	(9.827.516.793.536)
-Tagihan *Fee* Penjualan tahun 2022 yang baru ditagihkan pada tahun 2023	(191.501.297.132)
- PBB Migas tahun pajak sebelum tahun 2023	(8.247.192.628)
-Tagihan PDRD sebelum tahun 2023 yang baru ditagihkan tahun 2023	(12.260.403.320)
-Koreksi ekuitas atas beban DMO Fee TA 2022 yang belum dicatat	(1.618.444.072.443)
-Koreksi akibat pencatatn Beban PDRD PPJ dan PAP tahun 2023 yang sebelumnya dicatat pada Koreksi Lainnya seluruhnya	375.142.063
Total Koreksi Lainnya	**(13.940.280.196.721)**

2) Koreksi Lain-Lain dari Panas Bumi sebesar Rp550.963.233.893 dipengaruhi oleh beberapa transaksi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Koreksi beban diestimasi setoran kepada pemerintah atas Pemindahbukuan PNBP Panas Bumi TW I TA 2023 yang telah diakui pada LK TA 2022	196.010.334.104
2	Koreksi atas beban diestimasi pengajuan *reimbursement* PPN atas pencadangan sebelum tahun 2023	221.532.430.072
3	Koreksi atas beban pengajuan *reimbursement* PPN atas pencadangan sebelum tahun 2023	(221.532.430.072)
4	Pemindahbukuan atas saldo cadangan *reimbursement* PPN	33.586.135.905
5	Koreksi beban diestimasi pencadangan PBB panas Bumi yang telah diakui pada LK TA 2022	321.366.763.884
Total Koreksi Lain-Lain		**550.963.233.893**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.02/2022 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi PNBP atas Kegiatan Usaha Panas Bumi, diatur bahwa atas transaksi pengajuan *reimbursement* PPN yang melewati tahun pencadangan dicatat terlebih dahulu sebagai Beban pada tahun berjalan untuk kemudian dilakukan koreksi pada akhir tahun. Sampai dengan 31 Desember 2023, pengajuan *reimbursement* PPN dari pengusaha yang melewati tahun pencadangan adalah sebesar Rp221.532.430.072. Jumlah tersebut akan dicatat sebagai :

a) koreksi lain-lain untuk menyesuaikan pengakuan beban *reimbursement* PPN tahun berjalan, dan;
b) koreksi pada beban diestimasi *reimbursement* PPN tahun pencadangan terkait.

d. Koreksi Lain-Lain pada UAPBUN TK BKF

Koreksi Lain-lain terdapat pada UAPBUN TK BKF untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar sebesar Rp2.687.518 yang berasal dari koreksi lainnya akibat adanya penghapusan utang.

G.2.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.338.745.845.087.589 dan Rp1.301.105.973.365.087 . Rincian Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut:

BA	DKEL	DDEL	TK	TM	Total 2023	Total 2022
999.00	5.005.658.620.605.389	(4.922.312.786.001.185)		-	83.345.834.604.204	134.094.338.178.970
999.01	4.488.665.370.298.490	(4.499.614.826.564.825)			(10.949.456.266.335)	(310.632.907.410.341)
999.02	740.486.926.182	(28.680.644.374.608)			(27.940.157.448.426)	(13.309.488.787.610)
999.03	171.913.885.451.554	(160.425.202.591.275)	-		11.488.682.860.279	91.143.686.885.893
999.04	2.421.628.094.281	(8.599.822.124.706)			(6.178.194.030.425)	(3.354.691.076.815)
999.05	974.614.277.734.882	(143.284.761.054.708)			831.329.516.680.174	784.129.392.933.307
999.07	269.580.108.003.592	(9.192.908.900)			269.570.915.094.692	250.525.895.824.267
999.08	227.076.794.927.342	(3.570.470.120.808)	3.101.577.212.413	(3.101.577.212.413)	223.506.324.806.534	402.219.454.215.702
999.99	457.788.044.408.011	(492.089.433.480.019)	(2.736.449.391.513)	1.610.217.250.413	(35.427.621.213.108)	(33.709.707.398.286)
TOTAL					1.338.745.845.087.589	1.301.105.973.365.087

1. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.00

Transaksi Antar Entitas sampai dengan 31 Desember 2023 berjumlah sebesar Rp83.345.834.604.204. Transaksi Antar Entitas terdiri dari akun Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) yang merupakan penerimaan kas yang bersumber dari pendapatan, penerimaan pembiayaan, dan penerimaan transito dan akun Diterima dari Entitas Lain (DDEL) yang merupakan pengeluaran kas yang bersumber dari belanja, transfer, pengeluaran pembiayaan dan pengeluaran transito

Akun	Rincian Akun	Jumlah Mutasi
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	5.005.658.620.605.389
313121	Diterima dari Entitas Lain	(4.922.312.786.001.185)
Jumlah		83.345.834.604.204

2. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.01

Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp10.949.456.266.335 yang berasal dari Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp4.488.665.370.298.490 dan Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp4.499.614.826.564.825.

3. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.02

Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp27.940.157.448.426 yang berasal dari Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp740.486.926.182, Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp28.680.644.374.608.

4. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.03

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp11.488.682.860.279 berasal dari selisih antara Diterima Dari Entitas Lain ,Ditagihkan ke Entitas Lain, dan Transfer Keluar dengan rincian sebagai berikut :

a) Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp171.913.885.451.554;

b) Diterima dari Entitas Lain (DDEL) sebesar minus Rp160.425.202.591.275.

5. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.04

Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp6.178.194.030.425 berasal dari selisih antara Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp2.421.628.094.281 dan Diterima Dari Entitas Lain sebesar minus Rp8.599.822.124.706.

6. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.05

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp831.329.516.680.174 berasal dari selisih antara Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp974.614.277.734.882 ditambah saldo Diterima Dari Entitas Lain sebesar minus Rp143.284.761.054.708.

7. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.07

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp269.570.915.094.692 berasal dari transaksi pengeluaran dan transaksi penerimaan. Transaksi Antar Entitas sebesar Rp269.570.915.094.692 merupakan selisih antara Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp269.580.108.003.592 ditambah saldo Diterima Dari Entitas Lain sebesar minus Rp9.192.908.900.

8. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.08

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp223.506.324.806.534 berasal dari transaksi pengeluaran dan transaksi penerimaan. Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023 terdiri dari akun Ditagihkan Ke Entitas Lain sebesar Rp227.076.794.927.342, Diterima Dari Entitas Lain sebesar minus Rp3.570.470.120.808, Transfer Keluar sebesar Rp3.101.577.212.413 dan transfer masuk sebesar minus Rp 3.101.577.212.413. Transfer Keluar pada satker Ditjen Perbendaharaan dan transfer masuk pada satker Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan karena adanya pengalihan utang pihak ketiga dari satuan kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan (999979) ke satuan kerja Satuan Kerja Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan (999801) berdasarkan BAST nomor BA-508/KPN.1207/2023 tanggal 27 September 2023.

9. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.99

Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp35.427.621.213.108 yang berasal dari transaksi pengeluaran dan transaksi penerimaan. Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp35.427.621.213.108 terdiri dari :

a. UAPBUN TK DJPb sebesar Rp89.623.412.494.455 berasal dari selisih antara DDEL – DKEL atas transaksi pengeluaran dan penerimaan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan rincian :
   1) Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp260.493.404.815.848;
   2) Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp170.869.992.321.393.

b. UAPBUN TK DJKN sebesar minus Rp3.495.337.715.104 terdiri dari :
   a) Ditagihkan Ke Entitas Lain sebesar Rp910.196.409.996;
   b) Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp3.279.291.390.000;
   c) Transfer Keluar sebesar minus Rp2.736.449.391.513;
   d) Transfer Masuk sebesar Rp1.610.206.656.413.

c. UAPBUN TK DJA sebesar minus Rp121.390.751.495.099 yang terdiri dari :
   1) Ditagihkan Ke Entitas Lain sebesar Rp153.722.904.372.913;
   2) Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp275.113.655.868.012.

d. UAPBUN TK BKF sebesar Rp225.654.456.440 yang terdiri dari :
   1) Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp226.542.792.680;
   2) Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp888.336.240.

e. UAPBUN TK DJPK sebesar minus Rp496.588.786.233 yang terdiri dari :
   1) Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp42.329.080.894.619;
   2) Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp42.825.669.680.852.

f. UAPBUN TK DJPPR sebesar Rp105.989.832.433
   1) Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp105.989.832.433;
   2) Diterima dari Entitas Lain sebesar Rp0.

G.2.5. KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) SELISIH KURS YANG BELUM TEREALISASI

Nilai Keuntungan / (Kerugian) Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kerugian selisih kurs dari Bagian Anggaran Transaksi Khusus 999.99 hasil revaluasi aset moneter yang telah direklasifikasi ke beban selisih kurs belum terealisasi.

G.2.6. MUTASI EKUITAS BUN DI K/L

Nilai mutasi Ekuitas BUN di K/L pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp24.500.983.833.957 dan minus Rp1.903.764.560.998. Mutasi Kas merupakan perubahan Ekuitas yang berasal dari aset yang bukan milik Kuasa BUN tapi menurut ketentuan wajib disajikan dalam neraca Kuasa BUN dengan rincian sebagai berikut :

No	Mutasi	2023	2022
1	Mutasi Kas DI Bendahara Pengeluaran	(18.216.293.568)	(32.123.110.511)
2	Mutasi Kas Lainnya Di K/L Dari Hibah	11.096.844.487.771	1.150.651.829.898
3	Mutasi Kas BLU	13.422.355.639.754	(3.022.293.280.385)
	Jumlah	**24.500.983.833.957**	**(1.903.764.560.998)**

1. Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar minus Rp18.216.293.568 dan minus Rp32.123.110.512 merupakan mutasi transaksi akun kas pada Bendahara Pengeluaran di ledger akrual dengan rincian sebagai berikut :

No	Kisaran Akun	2023	2022
1	111611	(32.793.960.286)	(21.787.760.776)
2	111613	14.577.666.718	(10.335.349.736)
	Jumlah	**(18.216.293.568)**	**(32.123.110.512)***

**Selisih sebesar Rp1 dengan Face Laporan Perubahan Ekuitas disebabkan oleh pembulatan*

2. Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp11.096.844.487.771 dan Rp1.150.651.829.898 yang merupakan jumlah mutasi transaksi akun kas lainnya di K/L dari hibah dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kisaran Akun	2023	2022
1	111822	11.096.844.487.771	1.150.651.829.898
	Total	**11.096.844.487.771**	**1.150.651.829.898**

3. Mutasi Kas BLU pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp13.422.355.639.754 dan minus Rp3.022.293.280.385 yang merupakan jumlah mutasi akun kas BLU dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kisaran Akun	2023	2022
1	111911	13.422.355.639.754	(3.022.293.280.385)
Total		**13.422.355.639.754**	**(3.022.293.280.385)**

G.2.7. EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar minus Rp3.328.187.950.388.477 dan minus Rp3.262.260.267.295.775. Ekuitas akhir sebesar minus Rp3.328.187.950.388.477 merupakan seluruh Ekuitas akhir BABUN sebesar minus Rp3.316.269.373.172.068 ditambah eliminasi sebesar minus Rp11.918.577.216.409. Rincian nilai Ekuitas akhir adalah:

NO	UNIT		2023	2022
	KODE	URAIAN		
1	999.00	Akuntansi Pusat	611.132.486.226.114	536.433.009.418.783
2	999.01	BA BUN Utang Pemerintah	(8.294.956.193.243.511)	(7.861.967.689.868.841)
3	999.02	BA BUN Hibah	0	0
4	999.03	BA BUN Investasi Pemerintah	4.153.239.563.426.996	3.827.718.880.770.841
5	999.04	BA BUN Pemberian Pinjaman	53.892.237.130.103	60.907.330.544.608
6	999.05	BA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa	(105.810.575.987.129)	(64.787.229.735.828)
7	999.07	BA BUN Belanja Subsidi	(28.287.401.199.194)	(42.327.401.721.901)
8	999.08	BA BUN Belanja Lain-lain	(72.518.435.781.776)	(67.223.517.455.607)
9	999.09	Badan Lainnya	29.854.766.285.853	29.625.443.493.878
10	999.99	BA BUN Transaksi Khusus	337.184.179.970.476	335.898.064.063.777
JUMLAH			**(3.316.269.373.172.068)**	**(3.245.723.110.490.290)**
ELIMINASI			**(11.918.577.216.409)**	**(16.537.156.805.485)**
EKUITAS AKHIR			**(3.328.187.950.388.477)**	**(3.262.260.267.295.775)**

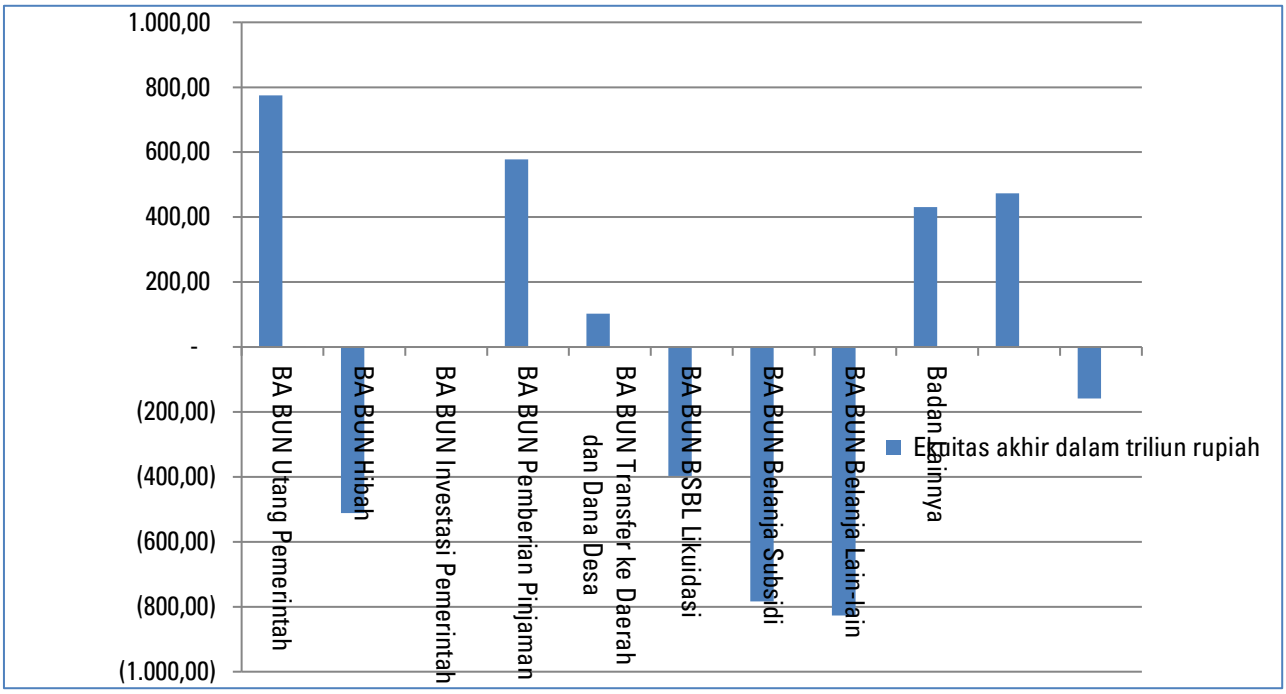

H. PENUTUP CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Demikianlah Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2023 *Audited* yang disusun dalam rangka pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 20 Mei 2024
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara

Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA

TAHUN 2023 *AUDITED*

MEI 2024

REALISASI PENDAPATAN BUN DAN HIBAH PER AKUN TAHUN 2023
(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	TAHUN 2023	%	TAHUN 2022	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	4	7
4	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	223.406.883.238.000	272.810.959.159.689	122,11%	238.341.910.171.353	34.469.048.988.336
42	Penerimaan Negara Bukan Pajak	220.306.883.238.000	255.626.800.279.964	116,03%	232.645.854.757.561	22.980.945.522.403
421	Penerimaan Sumber Daya Alam	105.893.722.264.000	118.872.894.679.746	112,26%	150.863.599.696.975	(31.990.705.017.229)
4211	Pendapatan Minyak bumi	76.351.120.000.000	87.408.885.465.416	114,48%	111.992.940.458.410	(24.584.054.992.994)
42111	Pendapatan Minyak Bumi	76.351.120.000.000	87.408.885.465.416	114,48%	111.992.940.458.410	(24.584.054.992.994)
421111	Pendapatan Minyak Bumi	76.351.120.000.000	87.408.885.465.416	114,48%	111.992.940.458.410	(24.584.054.992.994)
4212	Pendapatan Gas Bumi	27.250.340.000.000	28.769.670.492.312	105,58%	36.705.949.688.708	(7.936.279.196.396)
42121	Pendapatan Gas Bumi	27.250.340.000.000	28.769.670.492.312	105,58%	36.705.949.688.708	(7.936.279.196.396)
421211	Pendapatan Gas Bumi	27.250.340.000.000	28.769.670.492.312	105,58%	36.705.949.688.708	(7.936.279.196.396)
4216	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	2.292.262.264.000	2.694.338.722.018	117,54%	2.164.709.549.857	529.629.172.161
42161	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	2.292.262.264.000	2.694.338.722.018	117,54%	2.164.709.549.857	529.629.172.161
421611	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	-	-		-	-
421621	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi	2.292.262.264.000	2.694.338.722.018	117,54%	2.164.709.549.857	529.629.172.161
422	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	81.535.797.918.000	82.058.743.373.870	100,64%	40.597.091.946.149	41.461.651.427.721
4221	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	81.535.797.918.000	82.058.743.373.870	100,64%	40.597.091.946.149	41.461.651.427.721
42213	Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN	80.699.547.194.000	81.217.243.776.870	100,64%	39.735.630.261.242	41.481.613.515.628
422131	Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan di Bawah Kementerian BUMN	40.839.347.648.000	40.839.347.648.527	100,00%	24.577.522.332.666	16.261.825.315.861
422132	Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan di Bawah Kementerian BUMN	39.860.199.546.000	40.377.896.128.343	101,30%	15.158.107.928.576	25.219.788.199.767
42214	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan	836.250.724.000	841.499.597.000	100,63%	861.461.684.907	(19.962.087.907)
422142	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan	836.250.724.000	841.499.597.000	100,63%	861.461.684.907	(19.962.087.907)
425	Pendapatan PNBP Lainnya	32.877.363.056.000	54.695.162.226.348	166,36%	41.185.163.114.437	13.509.999.111.911
4251	Pendapatan Penjualan dan Sewa	8.227.521.628.000	5.754.146.701.830	69,94%	11.244.432.667.622	(5.490.285.965.792)
42512	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	75.509.147.000	83.766.112.697	110,94%	14.125.000	83.751.987.697
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	75.509.147.000	83.766.112.697	110,94%	14.125.000	83.751.987.697
42514	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	338.243.520.000	1.043.500.873.159	308,51%	889.666.645.093	153.834.228.066
425141	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS	6.688.000	213.724.267.365	3195637,97%	251.840.175.563	(38.115.908.198)
425142	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B	117.389.786.000	528.386.930.575	450,11%	352.188.146.613	176.198.783.962
425143	Pendapatan atas Pemanfaatan Aset Properti	2.366.044.000	637.160.330	26,93%	2.099.951.416	(1.462.791.086)
425144	Pendapatan Atas Aset Saham dan Surat Berharga Lain	-	2.577.149.393		548.127.671	2.029.021.722
425145	Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa	7.000.000.000	3.057.175.007	43,67%	7.469.190.983	(4.412.015.976)
425149	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya dari Pengelola Barang	211.481.002.000	295.118.190.489	139,55%	275.521.052.847	19.597.137.642
42516	Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	7.813.768.961.000	4.626.879.715.974	59,21%	10.354.751.897.529	(5.727.872.181.555)
425161	Pendapatan Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak	-	-		-	-
425162	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	6.994.730.000.000	4.446.262.623.442	63,57%	9.908.737.554.844	(5.462.474.931.402)
425169	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	819.038.961.000	180.617.092.532	22,05%	446.014.342.685	(265.397.250.153)
4252	PENDAPATAN ADMINISTRASI DAN PENEGAKAN	42.270.000	456.468.837	1079,89%	248.049.857	208.418.980
42523	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi	42.270.000	456.468.837	1079,89%	248.049.857	208.418.980
425235	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi	42.270.000	456.468.837	1079,89%	248.049.857	208.418.980

REALISASI PENDAPATAN BUN DAN HIBAH PER AKUN TAHUN 2023
(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	TAHUN 2023	%	TAHUN 2022	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	4	7
						-
4257	PENDAPATAN BUNGA, PENGELOLAAN REKENING PERBANKAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN	21.206.014.146.000	39.103.559.676.563	184,40%	18.244.301.898.597	20.859.257.777.966
42571	Pendapatan Bunga	1.456.467.682.000	2.875.211.148.313	197,41%	2.059.610.935.426	815.600.212.887
425713	Pendapatan Bunga dari Piutang dan Pemberian Pinjaman	1.234.415.892.000	1.619.952.431.808	131,23%	1.157.139.600.212	462.812.831.596
425719	Pendapatan Bunga Lainnya	222.051.790.000	1.255.258.716.505	565,30%	902.471.335.214	352.787.381.291
						-
42572	Pendapatan Gain on Bond Redemption	-	105.211.500.000		-	105.211.500.000
425721	Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Jangka Panjang	-	105.211.500.000		-	105.211.500.000
						-
42573	Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	4.024.133.637.000	7.122.426.793.095	176,99%	1.016.337.174.900	6.106.089.618.195
425731	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah	3.486.888.654.000	6.510.426.214.822	186,71%	966.886.960.600	5.543.539.254.222
425733	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Negeri/Rupiah	537.244.983.000	612.000.578.273	113,91%	49.450.214.300	562.550.363.973
						-
42574	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan Fee Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara	279.372.587.000	408.068.053.648	146,07%	319.738.176.863	88.329.876.785
425741	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur	133.875.835.000	132.719.012.880	99,14%	71.085.329.125	61.633.683.755
425744	Pendapatan Bunga Reverse Repo	14.687.555.000	134.699.993.259	917,10%	17.075.801.648	117.624.191.611
425747	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Loss Limit	130.809.197.000	140.422.121.120	107,35%	231.577.046.090	(91.154.924.970)
425748	Pendapatan atas Penempatan Uang berprinsip Syariah	-	226.926.389		-	226.926.389
42575	Pendapatan dari Selisih Kurs	-	139.897.111.019		201.383.464.194	(61.486.353.175)
425751	Pendapatan dari Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	-	139.897.111.019		201.383.464.194	(61.486.353.175)
42576	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening	47.689.586.000	119.508.223.930	250,60%	70.659.820.145	48.848.403.785
425762	Pendapatan Jasa Bank dari Pemberian Pinjaman	-	88.435.656		88.435.656	-
425763	Pendapatan Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman	35.044.910.000	84.502.824.372	241,13%	47.189.203.158	37.313.621.214
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	12.634.905.000	34.916.450.292	276,35%	23.354.537.888	11.561.912.404
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	9.771.000	513.610	5,26%	27.643.443	(27.129.833)
						-
42577	Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	15.398.350.654.000	28.333.236.846.558	184,00%	14.576.572.327.069	13.756.664.519.489
425772	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum	69.804.932.000	135.698.767.125	194,40%	93.222.641.098	42.476.126.027
425773	Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling	382.190.779.000	496.523.253.915	129,92%	304.453.086.500	192.070.167.415
425774	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia	14.454.880.110.000	27.251.700.777.294	188,53%	13.862.039.693.700	13.389.661.083.594
425776	Pendapatan atas pengelolaan Rekening Khusus (Reksus) Pinjaman dan/atau Hibah	491.474.833.000	449.314.048.224	91,42%	316.856.905.771	
						-
4258	PENDAPATAN DENDA	347.053.276.000	8.990.578.863	2,59%	7.465.771.656	1.524.807.207
42581	Pendapatan Denda I	347.053.276.000	5.765.419.356	1,66%	3.943.246.022	1.822.173.334
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	347.053.276.000	387.369.764	0,11%	1.743.596.340	(1.356.226.576)
425814	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA	-	14.729.016		4.987.769	9.741.247
425815	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia	-	10.000		-	10.000
425816	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury Notional Pooling	-	140.000		-	140.000
425817	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi	-	227.913.125		461.574.733	(233.661.608)

REALISASI PENDAPATAN BUN DAN HIBAH PER AKUN TAHUN 2023
(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	TAHUN 2023	%	TAHUN 2022	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	4	7
425818	Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas	-	5.135.257.451		1.705.268.702	3.429.988.749
425819	Pendapatan Denda terkait Pengusahaan Panas Bumi	-	-		27.818.478	(27.818.478)
42582	Pendapatan Denda II	-	3.225.159.507	-	3.214.290.020	
425821	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Saldo BO II ke BO I	-	-		40.000	(40.000)
425823	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman	-	3.225.159.507		3.214.050.020	11.109.487
425826	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh debitur Kredit Pemerintah (KUMK)	-	-		200.000	(200.000)
42583	Pendapatan Denda III	-	-		308.235.614	(308.235.614)
425839	Pendapatan Denda Lainnya	-	-		308.235.614	(308.235.614)
4259	PENDAPATAN LAIN-LAIN	3.096.731.736.000	9.828.008.800.255	317,37%	11.688.714.726.705	(1.860.705.926.450)
42591	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I	2.843.738.215.000	9.478.108.267.995	333,30%	10.255.979.631.103	(777.871.363.108)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	645.975.174.000	2.617.449.782	0,41%	67.000	2.617.382.782
425915	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	959.288.000	20.857.868.202	2174,31%	2.284.270.877.047	(2.263.413.008.845)
425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	72.253.629.000	51.494.391.768	71,27%	172.854.902.180	(121.360.510.412)
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-		47.792.520	(47.792.520)
425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	451.437.000	725.682.006.818	160749,34%	1.541.142.316.527	(815.460.309.709)
425919	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu	2.124.098.687.000	8.677.456.551.425	408,52%	6.257.663.675.829	2.419.792.875.596
42592	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II	220.991.702.000	327.244.663.561	148,08%	475.581.716.006	(148.337.052.445)
425921	Penerimaan Kembali Belanja Kontribusi Sosial TAYL	220.991.702.000	327.244.663.561	148,08%	475.581.716.006	(148.337.052.445)
42598	Pendapatan Lain-Lain I	-	778.369.517		203.370.109.038	(202.591.739.521)
425981	Penerimaan Lainnya dari Piutang Pemberian Pinjaman	-	284.527.106		-	284.527.106
425982	Penerimaan Akumulasi Iuran Pensiun	-	-		-	-
425983	Pendapatan Dari Sisa Dana Kampanye	-	-		-	-
425984	Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan	-	493.842.411		203.370.109.038	(202.876.266.627)
			-			
42599	Pendapatan Lain-Lain	32.001.819.000	21.877.499.182	68,36%	753.783.270.558	143.414.331.471
425998	Pendapatan dari Retur SP2D	1.780.277.000	3.945.146.763	221,60%	4.024.565.568	(79.418.805)
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	30.221.542.000	17.932.352.419	59,34%	749.758.704.990	(731.826.352.571)
43	Penerimaan Hibah	3.100.000.000.000	17.184.158.879.725	554,33%	5.696.055.413.792	11.488.103.465.933
431	Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri	3.100.000.000.000	17.184.158.879.725	554,33%	5.696.055.413.792	11.488.103.465.933
4311	Pendapatan Hibah Dalam Negeri	-	15.361.429.146.772	-	2.672.694.521.172	12.688.734.625.600
431111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Perorangan	-	-		-	-
431131	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Perorangan	-	-		766.400.000	(766.400.000)
431132	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Lembaga/Badan Usaha	-	137.278.319.260		130.825.019.513	6.453.299.747
431133	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Pemerintah Daerah	-	15.221.390.183.638		2.526.187.637.207	12.695.202.546.431
431139	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Lainnya	-	2.760.643.874		14.915.464.452	(12.154.820.578)
4312	Pendapatan Hibah Luar Negeri	3.100.000.000.000	1.822.729.732.953	58,80%	3.023.360.892.620	(1.200.631.159.667)

REALISASI PENDAPATAN BUN DAN HIBAH PER AKUN TAHUN 2023
(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	TAHUN 2023	%	TAHUN 2022	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	4	7
43121	Pendapatan Hibah Luar Negeri	3.100.000.000.000	423.174.970.047	13,65%	585.850.301.025	(162.675.330.978)
431211	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Perorangan	-	-		-	-
431212	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Bilateral	3.100.000.000.000	181.831.927.857	5,87%	186.394.259.492	(4.562.331.635)
431213	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Multilateral	-	241.343.042.190		399.456.041.533	(158.112.999.343)
		-				
43123	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Uang	-	1.399.554.762.906	-	2.437.510.591.595	(1.037.955.828.689)
431231	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung – Perorangan	-	1.250.430.211		2.061.618.178	(811.187.967)
431232	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung – Bilateral	-	523.321.750.393		96.937.080.633	426.384.669.760
431233	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung – Multilateral	-	850.175.319.681		2.314.500.561.582	(1.464.325.241.901)
431239	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung - Lainnya	-	24.807.262.621		24.011.331.202	795.931.419

REALISASI PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
TAHUN 2023
(dalam rupiah)

No.	BUMN	Jumlah Pembayaran
1	2	3
BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN		82.058.743.373.870
DIVIDEN		81.209.265.775.906
BUMN		81.209.261.246.182
PERBANKAN		40.839.347.648.517
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	12.845.238.801.206
2	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.394.892.745.535
3	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	23.233.807.478.672
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	365.408.623.104
PERBANKAN (MINORITAS)		10
1	PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.	10
NON PERBANKAN (MAYORITAS)		40.369.913.597.665
1	PT Pertamina (Persero)	14.024.480.569.987
2	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	8.648.487.373.596
3	PT Pupuk Indonesia (Persero)	5.046.000.000.000
4	PT Biofarma (Persero)	69.575.000.000
5	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	384.563.770.126
6	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	1.377.200.000.000
7	PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	7.456.000.000.000
8	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	847.606.883.956
9	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	101.000.000.000
10	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	127.000.000.000
11	Perum Perhutani	100.000.000.000
12	PT PLN (Persero)	2.188.000.000.000
NON PERBANKAN (MINORITAS)		4.529.724
1	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	71.219
2	PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	115.935
3	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	80
4	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	5.470
5	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	141
6	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	7.928
7	PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero)	1.392.418
8	PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	373.895
9	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	2
10	PT Nindya Karya	44.096
11	PT Timah	42
12	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	102.936

REALISASI PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
TAHUN 2023
(dalam rupiah)

No.	BUMN	Jumlah Pembayaran
1	2	3
13	PT Surveyor Indonesia (Persero)	2.069.311
14	PT Sucofindo (Persero)	256.026
15	PT Jaminan Kredit Indonesia	90.225
PEMBAYARAN PIUTANG SEBELUM TB 2022		7.978.000.954
1	PT Perkebunan Nusantara II	6.448.400.375
2	PT Jasa Raharja (Persero)	327.933
3	PT Inhutani V	529.131.000
4	PT Asuransi Kredit Indonesia	1.000.000.000
5	PT Askrindo	141.646
BUMN di Bawah Kementerian Keuangan		841.499.597.000
1	PT Sarana Multi Infrastruktur	595.100.000.000
2	PT Sarana Multigriya Finansial	83.537.000.000
3	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	142.834.724.200
4	PT Geo Dipa Energi (Persero)	15.027.872.800
5	PT Karabha Digjaya	5.000.000.000
JUMLAH TOTAL		82.058.743.373.870

REKAPITULASI TRANSFER KE DAERAH
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	TRANSFER KE DAERAH	**887.815.612.668.000**	**881.430.544.208.454**	**99,28%**	**6.385.068.459.546**
A	**Dana Bagi Hasil**	**205.888.399.698.000**	**205.666.564.020.630**	**99,89%**	**221.835.677.370**
A.1.1.1	**Dana Bagi Hasil Pajak**	**69.814.195.396.000**	**69.722.008.418.530**	**99,87%**	**92.186.977.470**
6111	**DBH PPh Perorangan**	**41.526.659.300.000**	**41.526.659.300.000**	**100,00%**	-
611111	Belanja DBH PPh psl 21	38.414.407.864.000	38.414.407.864.000	100,00%	-
611112	Belanja DBH PPh psl 25/29 OP	3.112.251.436.000	3.112.251.436.000	100,00%	-
6112	**DBH PBB**	**22.319.338.323.000**	**22.319.338.323.000**	**100,00%**	-
611211	Belanja DBH PBB untuk Propinsi	3.565.383.463.000	3.565.383.463.000	100,00%	-
611212	Belanja DBH PBB untuk Kabupaten/Kota	18.627.080.448.000	18.627.080.448.000	100,00%	-
611213	Belanja DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi	17.693.791.000	17.693.791.000	100,00%	-
611214	Belanja DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/Kota	102.417.369.000	102.417.369.000	100,00%	-
611215	Belanja DBH PBB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan sama rata ke Kabupaten/Kota	6.763.252.000	6.763.252.000	100,00%	-
6131	**DBH Cukai**	**5.968.197.773.000**	**5.876.010.795.530**	**98,46%**	**92.186.977.470**
613111	Belanja DBH Cukai Hasil Tembakau	5.968.197.773.000	5.876.010.795.530	98,46%	92.186.977.470
A.1,1.2	**Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam**	**136.074.204.302.000**	**135.944.555.602.100**	**99,90%**	**129.648.699.900**
6121	**DBH SDA Minyak Bumi**	**16.491.258.147.000**	**16.491.258.147.000**	**100,00%**	-
612111	Belanja DBH Minyak Bumi 15%	15.662.289.369.000	15.662.289.369.000	100,00%	-
612112	Belanja DBH Minyak Bumi 0,5%	135.260.090.000	135.260.090.000	0,00%	-
612113	Tambahan Belanja DBH Minyak Bumi dalam rangka Otonomi Khusus	693.708.688.000	693.708.688.000	100,00%	-
6122	**DBH SDA Gas Bumi**	**11.738.041.628.000**	**11.738.041.628.000**	100,00%	-

REKAPITULASI TRANSFER KE DAERAH
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
612211	Belanja DBH Gas Bumi 30%	8.799.355.996.000	8.799.355.996.000	100,00%	-
612212	Belanja DBH Gas Bumi 0.5%	58.203.035.000	58.203.035.000	-	-
612213	Tambahan Belanja DBH Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus	2.880.482.597.000	2.880.482.597.000	100,00%	-
6123	**DBH SDA Pertambangan Umum**	**99.425.415.550.000**	**99.425.415.550.000**	**100,00%**	**-**
612311	Belanja DBH Pertambangan Umum - Iuran Tetap	554.826.269.000	554.826.269.000	100,00%	-
612312	Belanja DBH Pertambangan Umum - Royalti	98.870.589.281.000	98.870.589.281.000	100,00%	-
6124	**DBH SDA Pertambangan Panas Bumi**	**2.005.232.650.000**	**2.005.232.650.000**	**100,00%**	**-**
612411	Belanja DBH Pertambangan Panas Bumi Setoran Bagian Pemerintah	1.887.756.288.000	1.887.756.288.000	100,00%	-
612412	Belanja DBH Pertambangan Panas Bumi- Iuran Tetap	27.976.384.000	27.976.384.000	100,00%	-
612413	Belanja DBH Pertambangan Panas Bumi- Iuran Produksi (Royalti)	89.499.978.000	89.499.978.000	100,00%	-
6125	**DBH SDA Kehutanan**	**2.113.842.034.000**	**1.984.193.334.100**	**93,87%**	**129.648.699.900**
612511	Belanja DBH Kehutanan - IIUPH/IHPH	122.746.306.000	112.661.113.100	91,78%	10.085.192.900
612512	Belanja DBH Kehutanan - PSDH	1.217.832.458.000	1.110.876.966.350	91,22%	106.955.491.650
612513	Belanja DBH Kehutanan - Dana Reboisasi	773.263.270.000	760.655.254.650	98,37%	12.608.015.350
6126	**DBH Perikanan**	**1.095.637.785.000**	**1.095.637.785.000**	**100,00%**	**-**
612611	Belanja DBH Perikanan	1.095.637.785.000	1.095.637.785.000	100,00%	-
6127	**DBH Lain-Lain**	**3.204.776.508.000**	**3.204.776.508.000**	**100,00%**	**-**
612711	Belanja DBH Perkebunan Sawit	3.204.776.508.000	3.204.776.508.000	100,00%	-
B	**Dana Alokasi Umum**	**398.162.039.057.000**	**398.029.628.594.542**	**57,33%**	**132.410.462.458**
621111	Belanja Dana Alokasi Umum	288.929.877.774.000	288.929.877.774.000	100,00%	-
621121	Belanja Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK	25.741.997.004.000	25.741.997.004.000	-	-
621122	Transfer Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan	1.669.979.718.000	1.644.028.375.953	98,45%	25.951.342.047
621123	Transfer Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan	40.062.746.791.000	39.993.776.407.340	99,83%	68.970.383.660
621124	Transfer Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan	26.031.470.651.000	26.023.518.505.877	99,97%	7.952.145.123
621125	Transfer Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum	15.725.967.119.000	15.696.430.527.372	99,81%	29.536.591.628

REKAPITULASI TRANSFER KE DAERAH
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
C	**Dana Alokasi Khusus**	**187.103.910.343.000**	**181.357.561.783.241**	**40,09%**	**5.746.348.559.759**
A.2.1	**Dana Alokasi Khusus Fisik**	53.422.463.835.000	50.334.741.347.305	**94,22%**	**3.087.722.487.695**
631111	Belanja DAK Fisik Reguler	-	-	-	-
631212	Belanja DAK Fisik Penugasan	53.422.463.835.000	50.334.741.347.305	94,22%	3.087.722.487.695
631311	Belanja DAK Afirmasi	-	-		-
A.2.2	**Dana Alokasi Khusus Non Fisik**	**130.214.110.762.000**	**128.081.946.376.309**	**98,36%**	**2.132.164.385.691**
654111	Belanja Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	50.449.571.133.000	49.547.218.967.514	98,21%	902.352.165.486
654112	Belanja Dana Tunjangan Khusus Guru	1.667.081.869.000	1.594.366.287.923	95,64%	72.715.581.077
654211	Belanja Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil	1.423.098.558.000	1.166.575.891.867	81,97%	256.522.666.133
654311	Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.441.572.210.000	53.094.401.455.075	99,35%	347.170.754.925
654711	Belanja Bantuan Operasional Kesehatan	12.878.672.152.000	12.412.991.969.900	96,38%	465.680.182.100
654712	Belanja Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.239.300.000.000	3.230.739.603.000	99,74%	8.560.397.000
654812	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	250.000.000.000	249.210.260.000	99,68%	789.740.000
654821	Belanja Dana Pelayanan Kepariwisataan	133.300.000.000	131.787.586.500	98,87%	1.512.413.500
654721	Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	65.827.750.000	62.003.157.725	94,19%	3.824.592.275
655211	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	132.000.000.000	128.562.300.000	97,40%	3.437.700.000
654921	Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	169.975.000.000	169.975.000.000	100,00%	-
655311	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	250.000.000.000	247.386.450.000	98,95%	2.613.550.000
655411	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	300.045.000.000	292.704.050.000	97,55%	7.340.950.000
654811	Belanja PK2UMK	-	-	0,00%	-
654911	Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	4.119.098.130.000	4.086.064.854.769	99,20%	33.033.275.231
654912	Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.494.568.960.000	1.475.083.542.036	98,70%	19.485.417.964
655511	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	200.000.000.000	192.875.000.000	96,44%	7.125.000.000
A.2.2	**Hibah Kepada Daerah**	**3.467.335.746.000**	**2.940.874.059.627**	**84,82%**	**526.461.686.373**
671111	Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	2.313.544.650.000	1.977.982.930.618	85,50%	335.561.719.382

REKAPITULASI TRANSFER KE DAERAH
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
671121	Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	164.726.096.000	143.405.713.248	87,06%	21.320.382.752
671131	Hibah kepada daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan	989.065.000.000	819.485.415.761	82,85%	169.579.584.239
D	**DANA OTONOMI KHUSUS**	**17.241.263.570.000**	**17.241.263.570.000**	**100,00%**	**-**
641111	Belanja Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	3.960.000.000.000	3.960.000.000.000	100,00%	-
641211	Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum Provinsi Papua	697.537.158.000	697.537.158.000	100,00%	-
641212	Belanja Dana Tambahan Infrastruktur Papua	734.634.275.000	734.634.275.000	100,00%	-
641213	Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua	871.921.448.000	871.921.448.000	100,00%	-
641221	Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Selatan	448.666.078.000	448.666.078.000	100,00%	-
641222	Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Selatan	472.527.485.000	472.527.485.000	100,00%	-
641223	Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Selatan	560.832.598.000	560.832.598.000	100,00%	-
641231	Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Tengah	734.493.413.000	734.493.413.000	100,00%	-
641232	Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Tengah	773.555.973.000	773.555.973.000	100,00%	-
641233	Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Tengah	918.116.766.000	918.116.766.000	100,00%	-
641241	Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Pegunungan	784.905.913.000	784.905.913.000	100,00%	-
641242	Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Pegunungan	826.649.561.000	826.649.561.000	100,00%	-
641243	Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Pegunungan	981.132.390.000	981.132.390.000	100,00%	-
641311	Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum Provinsi Papua Barat	665.426.268.000	665.426.268.000	100,00%	-
641312	Belanja Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	803.970.737.000	803.970.737.000	100,00%	-
641313	Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Barat	831.782.835.000	831.782.835.000	100,00%	-
641321	Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Barat Daya	628.971.170.000	628.971.170.000	100,00%	-
641322	Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat Daya	759.925.539.000	759.925.539.000	100,00%	-
641323	Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Barat Daya	786.213.963.000	786.213.963.000	100,00%	-
E	**DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**	**1.420.000.000.000**	**1.372.725.809.224**	**96,67%**	**47.274.190.776**

REKAPITULASI TRANSFER KE DAERAH
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
642111	Belanja Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	1.420.000.000.000	1.372.725.809.224	96,67%	47.274.190.776
F	**DANA DESA**	**70.000.000.000.000**	**69.856.768.617.317**	**99,80%**	**143.231.382.683**
662111	Belanja Dana Desa	70.000.000.000.000	69.856.768.617.317	99,80%	143.231.382.683
G	**INSENTIF FISKAL**	**8.000.000.000.000**	**7.906.031.813.500**	**98,83%**	**93.968.186.500**
643111	Belanja Dana Insentif Daerah (DID)	8.000.000.000.000	7.906.031.813.500	98,83%	93.968.186.500

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil		Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus			Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DIY				Total Transfer ke Daerah
		Tunai	Non Tunai		DAK Fisik	DAK Nonfisik	Hibah ke Daerah	Dana Desa	Insentif Fiskal	Otonomi Khusus	Keistemewaan DIY	
(1)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) +(13)
1	Provinsi Aceh	369.298.499.300	126.007.947.000	2.015.956.282.000	338.647.055.747	770.103.574.838	1.214.048.550	-	10.448.709.000	3.960.000.000.000	-	7.591.676.116.435
2	Kab. Aceh Barat	115.089.186.050	157.955.249.000	562.859.849.000	53.986.632.826	107.421.906.583	887.507.653	231.144.301.000	37.041.386.000	-	-	1.266.386.018.112
3	Kab. Aceh Besar	19.595.624.700	10.073.263.000	773.374.190.000	56.816.350.198	180.758.823.727	230.836.300	437.492.408.200	4.798.815.500	-	-	1.483.140.311.625
4	Kab. Aceh Selatan	18.110.097.750	7.634.753.000	616.802.018.000	203.089.980.815	153.817.416.775	916.000.000	202.793.203.000	15.183.417.000	-	-	1.218.346.886.340
5	Kab. Aceh Singkil	25.456.045.700	8.346.892.000	422.045.158.000	45.696.428.103	85.672.813.240	-	96.032.347.000	15.570.019.000	-	-	698.819.703.043
6	Kab. Aceh Tengah	28.108.771.175	11.045.730.000	585.463.718.000	72.265.931.600	114.409.379.805	570.000.000	220.809.735.164	16.282.177.000	-	-	1.048.955.442.744
7	Kab. Aceh Tenggara	14.243.820.475	7.158.899.000	563.266.659.000	63.902.655.700	129.682.370.387	-	280.160.798.400	12.882.330.000	-	-	1.071.297.532.962
8	Kab. Aceh Timur	59.714.377.625	28.060.317.000	796.117.446.000	61.260.634.812	204.826.272.731	2.307.947.608	390.532.377.000	-	-	-	1.542.819.372.776
9	Kab. Aceh Utara	56.631.521.650	20.998.916.000	934.588.309.000	175.141.744.791	342.953.177.340	17.134.280	639.061.446.128	11.402.579.000	-	-	2.180.794.828.189
10	Kab. Bireuen	18.423.347.250	8.057.878.000	829.294.942.000	73.875.217.280	204.968.506.848	224.163.000	461.692.050.000	23.228.989.000	-	-	1.619.765.093.378
11	Kab. Pidie	23.906.113.125	10.436.287.000	860.070.145.000	119.959.590.971	189.962.301.811	300.000.000	541.247.856.400	-	-	-	1.745.882.294.307
12	Kab. Simeulue	14.673.905.600	7.046.771.000	434.880.917.000	62.264.451.263	64.079.746.129	-	105.738.659.999	-	-	-	688.684.450.991
13	Kota Banda Aceh	38.416.387.025	14.444.029.000	558.111.448.000	43.781.961.717	106.048.470.752	-	76.172.967.000	5.781.382.000	-	-	842.756.645.494
14	Kota Sabang	9.120.408.000	7.103.736.000	347.007.103.000	19.836.507.531	32.901.831.860	300.000.000	15.539.645.000	35.206.620.000	-	-	467.015.851.391
15	Kota Langsa	19.207.751.350	7.992.463.000	422.491.297.000	52.495.159.464	73.467.760.353	-	58.499.724.540	16.299.407.000	-	-	650.453.562.707
16	Kota Lhokseumawe	22.490.672.030	8.698.720.000	436.369.459.000	22.632.985.556	81.096.467.226	222.000.000	61.401.253.255	5.730.566.000	-	-	638.642.123.067
17	Kab. Gayo Lues	17.932.087.850	7.948.594.000	435.422.473.000	66.917.270.566	56.826.406.322	-	109.847.539.000	20.875.605.000	-	-	715.769.975.738
18	Kab. Aceh Barat Daya	19.972.231.400	11.822.127.000	426.076.559.000	53.908.264.797	77.604.211.879	484.500.000	117.484.720.000	-	-	-	707.352.614.076
19	Kab. Aceh Jaya	24.769.209.000	10.247.135.000	408.168.879.000	41.167.760.722	67.405.938.277	-	126.437.618.000	28.217.028.000	-	-	706.413.567.999
20	Kab. Nagan Raya	55.896.683.280	51.026.752.000	494.114.879.000	45.800.001.198	87.636.465.345	963.978.880	172.000.868.700	-	-	-	907.439.628.403
21	Kab. Aceh Tamiang	86.236.561.000	19.263.690.000	506.078.084.000	73.322.845.016	139.145.675.134	6.300.000.000	171.848.441.900	5.955.668.000	-	-	1.008.150.965.050
22	Kab. Bener Meriah	14.051.559.200	7.196.982.000	433.046.325.000	55.642.713.214	90.706.382.550	-	171.270.409.000	17.520.000.000	-	-	789.434.370.964
23	Kab. Pidie Jaya	14.269.738.940	7.096.480.000	419.269.711.000	49.347.130.631	82.687.279.100	-	169.305.735.000	34.904.197.000	-	-	776.880.271.671
24	Kota Subulussalam	16.655.260.850	7.480.434.000	331.090.267.000	39.180.253.160	59.307.539.746	-	69.260.845.000	23.878.854.000	-	-	546.853.453.756
25	Provinsi Sumatera Utara	514.152.593.000	142.105.684.000	2.683.046.680.000	406.604.190.383	1.743.051.869.304	65.913.215.833	-	29.555.902.000	-	-	5.584.430.134.520
26	Kab. Asahan	72.264.264.350	10.696.424.000	874.171.084.000	97.300.890.613	239.380.277.065	4.404.000	172.864.791.072	12.060.032.000	-	-	1.478.742.167.100
27	Kab. Dairi	22.298.432.000	3.126.124.000	590.036.443.000	97.765.061.442	174.906.544.116	-	135.230.180.200	33.666.172.000	-	-	1.057.028.956.758
28	Kab. Deli Serdang	70.152.803.000	23.178.265.000	1.507.827.881.000	37.502.068.560	581.587.042.066	-	347.737.140.900	11.679.399.000	-	-	2.579.664.599.526
29	Kab. Karo	23.308.771.800	3.926.194.000	713.665.458.000	100.719.686.844	174.085.193.380	-	203.762.583.000	5.720.993.000	-	-	1.225.188.880.024
30	Kab. Labuhanbatu	71.622.032.300	12.987.453.000	674.333.419.000	96.847.341.054	176.092.788.690	-	77.238.661.800	5.689.126.000	-	-	1.114.810.821.844
31	Kab. Langkat	123.489.849.000	18.699.902.000	1.175.338.708.000	48.292.510.754	381.000.912.839	-	242.184.832.050	5.858.773.000	-	-	1.994.865.487.643
32	Kab. Mandailing Natal	58.876.966.000	20.578.402.000	785.295.335.206	83.765.629.121	282.029.061.050	-	303.959.196.060	-	-	-	1.534.504.589.437
33	Kab. Nias	15.354.175.000	2.693.070.000	430.440.649.000	104.923.397.190	109.536.810.209	-	147.262.254.000	25.772.677.000	-	-	835.983.032.399
34	Kab. Simalungun	66.280.711.450	13.313.973.000	1.203.827.008.542	76.086.729.456	339.186.046.344	18.668.029.548	340.366.720.000	5.819.949.000	-	-	2.063.549.167.340
35	Kab. Tapanuli Selatan	163.970.939.000	45.378.016.000	621.084.073.000	114.160.422.278	145.573.503.106	-	164.370.515.000	5.780.754.000	-	-	1.260.318.222.384
36	Kab. Tapanuli Tengah	30.000.603.000	4.741.257.000	632.394.053.000	62.700.850.461	171.818.030.921	-	142.789.478.000	-	-	-	1.044.444.272.382
37	Kab. Tapanuli Utara	55.383.425.000	11.635.974.000	627.696.920.000	103.496.236.437	184.862.295.824	-	198.733.682.000	10.824.467.000	-	-	1.192.633.000.261
38	Kab. Toba Samosir	23.473.881.000	4.590.611.000	533.949.792.000	117.410.337.188	133.085.398.786	-	175.172.265.000	11.129.595.000	-	-	998.811.879.974
39	Kota Binjai	23.961.732.000	4.111.007.000	550.791.550.304	32.867.999.580	122.903.084.289	-	-	-	-	-	734.635.373.173
40	Kota Medan	207.145.606.000	75.791.247.000	1.678.680.488.000	38.650.129.380	539.817.205.889	-	-	-	-	-	2.540.084.676.269
41	Kota Pematang Siantar	28.052.786.000	4.079.631.000	576.259.190.000	15.752.927.984	116.334.625.883	894.000.000	-	-	-	-	741.373.160.867
42	Kota Sibolga	15.534.929.000	3.061.403.000	399.477.297.000	14.878.158.026	48.502.291.838	-	-	9.631.189.000	-	-	491.085.267.864
43	Kota Tanjung Balai	14.776.233.000	3.737.890.000	418.215.735.000	30.804.146.082	62.788.753.620	-	-	-	-	-	530.322.757.702
44	Kota Tebing Tinggi	15.585.512.000	3.768.719.000	404.255.745.323	22.791.104.136	76.744.944.526	-	-	11.456.003.000	-	-	534.602.027.985
45	Kota Padang Sidempuan	26.555.479.000	4.385.563.000	487.742.812.000	29.946.821.196	100.612.170.875	-	32.910.291.000	5.934.839.000	-	-	688.087.976.071
46	Kab. Pakpak Bharat	14.435.646.000	2.628.237.000	333.800.565.000	57.344.549.417	40.775.354.620	-	39.723.617.220	34.240.186.000	-	-	522.948.155.257
47	Kab. Nias Selatan	29.281.993.000	3.527.747.000	648.820.634.000	152.927.148.799	210.826.662.194	-	397.908.274.020	23.520.905.000	-	-	1.466.813.364.013
48	Kab. Humbang Hasundutan	17.930.286.000	3.188.090.000	503.439.138.000	85.099.858.042	128.594.423.998	22.342.974.255	127.331.009.000	10.591.152.000	-	-	898.516.931.295
49	Kab. Serdang Bedagai	51.614.205.000	10.334.181.000	768.733.854.000	184.320.758.903	234.773.077.484	-	205.897.856.795	11.970.689.000	-	-	1.467.644.622.182
50	Kab. Samosir	14.500.485.000	2.744.263.000	432.633.498.000	97.090.526.323	102.758.231.870	-	101.652.622.000	5.780.929.000	-	-	757.160.555.193
51	Kab. Batu Bara	36.703.533.000	7.496.181.000	585.018.821.000	102.282.477.703	170.921.061.120	-	135.959.571.000	-	-	-	1.038.381.644.823
52	Kab. Padang Lawas	47.878.940.000	8.443.314.000	512.414.223.000	50.422.562.814	143.466.891.202	-	234.350.055.880	-	-	-	996.975.986.896
53	Kab. Padang Lawas Utara	61.983.009.000	9.886.754.000	536.198.939.000	52.885.321.616	142.610.630.226	-	290.697.938.465	-	-	-	1.094.262.592.307
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	91.230.923.480	15.854.018.000	495.683.083.000	58.496.087.353	114.003.813.514	-	59.337.613.000	16.994.463.000	-	-	851.600.001.347
55	Kab. Labuhanbatu Utara	50.787.995.000	8.862.746.000	580.480.580.000	63.494.386.739	160.643.578.839	-	89.370.339.400	-	-	-	953.639.625.978
56	Kab. Nias Utara	22.596.317.000	2.677.723.000	406.517.376.000	221.305.660.063	107.600.920.184	-	112.247.060.856	19.709.879.000	-	-	892.654.936.103
57	Kab. Nias Barat	15.923.225.000	2.901.613.000	347.858.834.000	97.920.409.279	134.429.497.674	-	95.642.748.627	22.463.593.000	-	-	717.139.920.580
58	Kota Gunungsitoli	15.415.417.000	2.596.756.000	416.947.521.000	63.956.240.394	81.076.900.467	-	85.859.661.318	25.589.523.000	-	-	691.442.019.179

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil		Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus			Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DIY				Total Transfer ke Daerah
		Tunai	Non Tunai		DAK Fisik	DAK Nonfisik	Hibah ke Daerah	Dana Desa	Insentif Fiskal	Otonomi Khusus	Keistemewaan DIY	
(1)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) +(13)
59	Provinsi Sumatera Barat	169.480.688.000	42.645.141.000	1.989.347.677.000	365.925.325.993	887.753.851.106	99.091.500	-	8.621.025.000	-	-	3.463.872.799.599
60	Kab. Lima Puluh Kota	33.301.015.000	2.932.001.000	720.233.257.000	38.742.529.210	220.253.273.745	3.080.099.400	83.887.365.000	5.827.164.000	-	-	1.108.256.704.355
61	Kab. Agam	21.996.369.600	2.976.063.000	785.542.586.000	47.863.369.762	250.556.537.945	3.654.000.000	86.653.550.000	-	-	-	1.199.242.476.307
62	Kab. Kepulauan Mentawai	18.144.642.040	2.347.840.000	570.590.401.000	89.054.044.924	84.448.879.680	-	46.289.511.000	19.459.955.000	-	-	830.335.273.644
63	Kab. Padang Pariaman	14.844.551.040	3.156.239.000	744.409.360.000	87.426.804.427	240.234.485.805	445.291.000	101.544.125.000	-	-	-	1.192.060.856.272
64	Kab. Pasaman	16.753.173.000	2.652.498.000	571.043.053.000	101.542.239.884	158.827.340.503	3.544.000.000	47.527.744.000	9.152.609.000	-	-	911.042.657.387
65	Kab. Pesisir Selatan	29.519.145.040	4.989.325.000	827.349.211.000	131.881.908.033	263.679.344.034	7.663.518.580	163.899.561.000	12.766.111.000	-	-	1.441.748.123.687
66	Kab. Sijunjung	40.049.960.040	7.080.420.000	525.559.748.000	58.253.320.626	136.668.551.512	1.683.119.000	61.883.611.800	11.780.311.000	-	-	842.959.041.978
67	Kab. Solok	21.101.434.220	6.539.215.000	681.191.523.000	79.481.643.058	219.874.948.421	1.184.000.000	80.024.193.600	-	-	-	1.089.396.957.299
68	Kab. Tanah Datar	17.859.829.000	3.162.225.000	668.017.465.000	86.100.318.154	189.460.986.853	3.157.882.000	74.105.465.000	18.941.225.000	-	-	1.060.805.396.007
69	Kota Bukit Tinggi	13.618.947.000	3.767.961.000	436.324.727.000	12.315.114.685	66.772.606.283	-	-	28.852.373.000	-	-	561.651.728.968
70	Kota Padang Panjang	8.801.501.040	2.173.048.000	361.339.320.000	4.580.717.464	36.045.472.969	-	-	9.492.819.000	-	-	422.432.878.473
71	Kota Padang	77.637.178.040	25.469.160.000	1.116.060.720.000	16.508.320.521	320.034.456.648	2.403.000.000	-	5.322.150.000	-	-	1.563.434.985.209
72	Kota Payakumbuh	10.496.411.000	2.643.676.000	431.696.361.000	16.755.427.452	79.834.984.936	1.800.000.000	-	46.963.381.000	-	-	590.190.241.388
73	Kota Sawahlunto	32.695.683.000	17.876.059.000	356.278.450.000	50.548.393.204	52.320.788.084	-	21.339.313.000	-	-	-	531.058.686.288
74	Kota Solok	16.534.620.000	2.895.674.000	384.258.149.000	10.732.648.707	47.040.886.960	918.000.000	-	20.752.894.000	-	-	483.132.872.667
75	Kota Pariaman	12.271.680.000	1.920.800.000	400.115.595.000	30.681.315.075	62.073.158.339	1.272.000.000	41.372.835.000	6.012.923.000	-	-	555.720.306.414
76	Kab. Pasaman Barat	40.324.868.000	4.575.691.000	635.133.413.000	26.779.297.620	188.907.295.039	1.549.569.363	34.974.531.000	-	-	-	932.244.665.022
77	Kab. Dharmasraya	32.559.296.900	8.825.218.000	489.147.384.000	58.171.037.299	127.291.059.981	1.924.000.000	54.485.661.000	8.601.217.000	-	-	781.004.874.180
78	Kab. Solok Selatan	51.166.858.740	14.296.316.000	452.753.785.000	42.530.454.207	107.142.406.614	-	41.852.235.000	-	-	-	709.742.055.561
79	Provinsi Riau	1.352.161.159.230	351.688.172.000	1.506.322.398.000	295.138.574.452	750.507.837.352	-	-	21.547.646.000	-	-	4.277.365.787.034
80	Kab. Bengkalis	2.130.376.070.420	393.994.668.000	354.443.414.000	67.083.395.782	254.060.055.947	-	129.623.338.071	-	-	-	3.329.580.942.220
81	Kab. Indragiri Hilir	265.598.768.000	99.763.407.000	925.271.205.000	53.416.611.274	277.250.348.304	-	182.593.182.000	9.492.022.000	-	-	1.813.385.543.578
82	Kab. Indragiri Hulu	217.514.856.000	71.969.213.000	660.001.937.000	41.885.411.434	194.636.965.509	-	154.430.302.740	18.296.512.000	-	-	1.358.735.197.683
83	Kab. Kampar	642.135.346.000	192.552.641.000	821.729.594.000	28.407.335.549	357.551.543.486	2.100.000.000	231.442.855.200	2.921.247.000	-	-	2.278.840.562.235
84	Kab. Kuantan Singingi	162.721.258.000	58.118.696.000	621.054.907.000	37.162.291.831	165.169.057.773	-	177.944.592.236	10.661.040.000	-	-	1.232.831.842.840
85	Kab. Pelalawan	380.570.543.000	108.793.713.000	618.072.347.000	43.314.780.278	173.802.488.525	238.000.000	101.503.434.900	10.712.519.000	-	-	1.437.007.825.703
86	Kab. Rokan Hilir	740.552.573.000	254.294.722.000	544.601.747.000	91.154.072.354	269.039.912.091	312.973.395	152.911.787.200	-	-	-	2.052.867.787.040
87	Kab. Rokan Hulu	324.292.550.000	67.539.992.000	679.044.550.000	58.208.064.851	237.816.744.097	-	139.870.726.000	13.493.601.500	-	-	1.520.266.228.448
88	Kab. Siak	881.052.802.000	186.190.614.000	398.729.635.000	31.824.443.977	205.064.916.696	-	115.395.616.000	16.236.941.000	-	-	1.834.494.968.673
89	Kota Dumai	472.087.448.000	73.949.108.000	449.062.021.000	47.075.071.699	131.896.126.535	-	-	46.474.391.000	-	-	1.220.544.166.234
90	Kota Pekanbaru	266.574.061.300	75.519.779.000	867.954.823.000	32.786.713.679	313.908.195.065	-	-	19.178.601.000	-	-	1.575.922.173.044
91	Kab. Kepulauan Meranti	207.663.065.000	58.012.401.000	422.490.388.480	79.250.197.369	109.278.208.100	-	98.162.430.900	-	-	-	974.856.690.849
92	Provinsi Jambi	362.456.524.735	186.431.079.000	1.329.855.095.000	340.552.290.077	407.631.235.919	27.815.501.472	-	8.710.271.000	-	-	2.663.451.997.203
93	Kab. Batanghari	247.149.337.075	66.208.726.000	584.208.560.000	108.043.229.303	138.467.348.923	3.000.000.000	99.657.256.000	11.899.348.000	-	-	1.258.633.805.301
94	Kab. Bungo	92.780.063.075	40.108.305.000	575.732.331.924	57.923.375.299	142.165.585.694	8.184.000.000	121.440.614.075	21.279.765.000	-	-	1.059.614.040.067
95	Kab. Kerinci	47.674.468.510	29.633.293.000	581.415.988.000	112.627.365.092	140.940.259.450	1.587.000.000	211.607.903.840	-	-	-	1.125.486.277.892
96	Kab. Merangin	70.217.465.300	33.715.666.000	686.824.203.000	71.494.372.292	173.205.878.281	3.000.000.000	175.219.610.000	10.820.277.000	-	-	1.224.497.471.873
97	Kab. Muaro Jambi	205.531.932.500	55.440.946.000	648.279.395.000	64.792.709.333	174.962.213.038	-	130.324.283.000	2.937.990.000	-	-	1.282.269.468.871
98	Kab. Sarolangun	208.947.627.200	68.703.611.000	551.748.668.000	46.855.505.392	134.648.117.552	-	129.227.629.400	10.828.425.500	-	-	1.150.959.584.044
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	439.670.101.030	395.687.869.000	496.596.308.000	40.889.963.150	135.567.010.711	-	99.079.758.000	17.494.167.000	-	-	1.624.985.176.891
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	155.134.485.000	58.262.313.000	533.012.945.000	121.474.955.418	117.007.706.726	-	70.448.548.000	11.748.303.000	-	-	1.067.089.256.144
101	Kab. Tebo	137.869.151.800	64.867.299.000	551.261.872.000	35.400.776.583	140.383.463.435	13.722.176.810	101.057.360.476	11.552.444.000	-	-	1.056.114.544.104
102	Kota Jambi	98.119.361.000	43.610.822.000	710.888.430.473	46.258.109.474	181.596.739.254	-	-	5.918.541.000	-	-	1.086.392.003.201
103	Kota Sungai Penuh	39.952.727.700	27.803.739.000	422.505.785.000	41.081.776.282	61.396.145.575	-	49.394.385.788	10.400.931.000	-	-	652.535.490.345
104	Provinsi Sumatera Selatan	1.657.640.060.950	876.968.828.000	1.653.766.188.000	261.641.344.656	899.680.733.318	139.433.676	-	-	-	-	5.349.836.588.600
105	Kab. Lahat	971.270.096.150	931.879.105.000	669.515.357.000	41.876.989.755	187.411.004.479	68.300.000	288.155.980.800	6.250.658.000	-	-	3.096.427.491.184
106	Kab. Musi Banyuasin	1.695.966.900.675	567.249.533.000	401.860.671.000	74.851.861.250	277.469.901.400	1.800.000.000	227.448.129.600	23.878.101.000	-	-	3.270.525.097.925
107	Kab. Musi Rawas	478.514.378.375	155.132.239.000	614.218.608.000	39.909.751.985	169.070.744.050	-	171.930.467.000	18.344.251.000	-	-	1.647.120.439.410
108	Kab. Muara Enim	1.163.441.177.900	577.038.863.000	637.334.626.000	39.649.991.641	230.522.846.173	2.403.998.090	222.027.045.200	-	-	-	2.872.418.548.004
109	Kab. Ogan Komering Ilir	173.705.540.000	94.163.870.000	1.029.845.802.000	134.680.501.080	324.958.820.736	-	293.398.688.610	5.781.341.000	-	-	2.056.534.563.426
110	Kab. Ogan Komering Ulu	213.108.242.000	100.911.706.000	617.363.975.000	30.745.624.717	156.764.366.745	-	130.350.421.350	-	-	-	1.249.244.335.812
111	Kota Palembang	243.081.078.000	117.465.973.000	1.308.777.352.000	74.457.669.075	456.145.173.454	90.440.811.006	-	11.929.501.000	-	-	2.302.297.557.535
112	Kota Prabumulih	253.942.092.000	112.324.739.000	407.321.017.000	30.966.215.433	87.883.263.462	-	10.466.952.000	6.057.097.000	-	-	908.961.375.895
113	Kota Pagar Alam	170.912.179.000	108.098.265.000	379.608.482.000	57.759.530.766	64.987.356.983	-	-	42.519.633.000	-	-	823.885.446.749
114	Kota Lubuk Linggau	109.859.321.000	80.886.497.000	460.637.393.000	23.767.652.185	99.657.618.693	-	-	12.715.141.000	-	-	787.523.622.878
115	Kab. Banyuasin	264.026.371.270	116.885.632.000	948.612.254.000	124.483.894.988	337.339.810.747	3.041.177.000	274.230.612.000	10.411.510.500	-	-	2.079.031.262.505
116	Kab. Ogan Ilir	178.823.070.675	94.381.941.000	606.680.884.000	103.123.213.253	196.960.303.205	900.000.000	197.126.540.000	15.450.437.000	-	-	1.393.446.389.133
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timu	118.211.551.270	82.228.149.000	794.105.327.000	114.963.724.429	246.593.514.246	3.108.000.000	264.660.335.450	39.675.813.000	-	-	1.663.546.414.395
118	Kab. Ogan Komering Ulu Sela	129.183.066.890	87.569.455.000	605.711.142.000	83.854.521.898	133.802.245.261	4.280.000.000	215.732.217.880	-	-	-	1.260.132.648.929

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil		Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus			Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DIY				Total Transfer ke Daerah
		Tunai	Non Tunai		DAK Fisik	DAK Nonfisik	Hibah ke Daerah	Dana Desa	Insentif Fiskal	Otonomi Khusus	Keistemewaan DIY	
(1)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) +(13)
119	Kab. Empat Lawang	157.742.878.270	105.272.155.000	417.034.194.000	131.003.161.391	98.505.775.550	1.654.375.000	129.032.263.000	5.960.565.000	-	-	1.046.205.367.211
120	Kab. Penukal Abab Lematang	616.161.604.270	192.547.290.000	308.134.810.000	14.862.868.151	79.086.283.029	-	62.903.377.000	17.824.662.000	-	-	1.291.520.894.450
121	Kab. Musi Rawas Utara	301.191.447.000	243.202.533.000	379.478.589.000	129.661.203.003	75.989.882.686	-	81.841.303.000	33.341.579.000	-	-	1.244.706.536.689
122	Provinsi Bengkulu	111.539.790.850	42.267.023.000	1.267.641.877.000	268.641.168.385	299.192.132.322	-	-	11.760.417.000	-	-	2.001.042.408.557
123	Kab. Bengkulu Selatan	61.908.829.000	20.583.413.000	536.688.344.000	60.037.369.176	109.150.485.776	-	109.109.020.000	23.681.209.000	-	-	921.158.669.952
124	Kab. Bengkulu Utara	114.525.606.000	74.462.126.000	606.318.806.000	69.031.320.039	162.842.870.059	2.220.000.000	178.385.537.000	26.654.996.000	-	-	1.234.441.261.098
125	Kab. Rejang Lebong	29.260.230.000	8.831.031.000	577.992.892.000	40.836.411.238	138.173.614.674	2.874.000.000	106.107.340.700	5.758.419.000	-	-	909.833.938.612
126	Kota Bengkulu	36.304.942.000	13.249.110.000	662.596.178.000	42.196.681.975	154.096.593.756	1.749.000.000	-	-	-	-	910.192.505.731
127	Kab. Kaur	39.980.323.000	12.735.367.000	423.186.364.000	96.058.269.892	84.541.029.300	-	144.289.587.000	5.818.885.000	-	-	806.609.825.192
128	Kab. Seluma	69.108.955.000	22.224.765.000	489.714.762.000	82.008.850.415	116.916.368.460	-	152.439.601.000	5.756.632.000	-	-	938.169.933.875
129	Kab. Mukomuko	42.107.896.300	10.582.716.000	472.734.721.000	102.710.002.019	103.458.365.026	-	121.650.874.700	-	-	-	853.244.575.045
130	Kab. Lebong	34.464.425.550	10.647.413.000	387.442.867.000	28.403.761.147	63.463.457.121	-	74.706.511.000	-	-	-	599.128.434.818
131	Kab. Kepahiang	18.942.909.000	6.383.764.000	413.017.151.000	37.307.625.900	76.684.465.278	-	85.034.005.600	13.289.870.000	-	-	650.659.790.778
132	Kab. Bengkulu Tengah	53.679.270.000	14.305.285.000	418.654.806.000	38.289.615.441	86.379.898.753	-	108.101.520.400	6.078.891.500	-	-	725.489.287.094
133	Provinsi Lampung	183.937.314.300	45.907.329.000	1.801.103.297.000	280.285.026.271	829.778.252.949	285.632.000	-	62.061.396.000	-	-	3.203.358.247.520
134	Kab. Lampung Barat	21.214.701.875	4.314.239.000	514.643.115.000	54.035.898.900	142.752.536.261	-	117.770.480.000	5.893.114.000	-	-	860.624.085.036
135	Kab. Lampung Selatan	36.943.196.000	8.677.215.000	1.023.510.080.000	101.167.894.249	345.343.487.793	300.000.000	257.544.305.000	18.530.209.000	-	-	1.792.016.387.042
136	Kab. Lampung Tengah	50.230.547.000	9.313.032.000	1.335.972.206.000	101.281.032.637	450.234.553.801	2.947.275.000	319.165.415.000	2.911.991.000	-	-	2.272.056.052.438
137	Kab. Lampung Utara	22.932.128.655	4.391.209.000	913.769.795.000	54.660.591.525	238.723.533.197	-	205.967.574.000	-	-	-	1.440.444.831.377
138	Kab. Lampung Timur	69.806.719.080	36.094.832.000	1.077.274.728.000	61.763.625.193	352.389.220.111	-	269.334.514.100	-	-	-	1.866.663.638.484
139	Kab. Tanggamus	77.189.291.125	35.120.926.000	750.150.136.000	54.939.901.656	245.770.672.585	105.625.000	265.278.346.509	5.801.127.000	-	-	1.434.356.025.875
140	Kab. Tulang Bawang	36.139.342.000	6.919.176.000	601.249.561.000	137.421.025.275	176.166.518.615	20.478.000	133.796.609.000	-	-	-	1.091.712.709.890
141	Kab. Way Kanan	31.567.318.850	7.239.531.000	646.116.461.000	75.839.869.755	213.251.521.152	-	198.651.640.000	17.959.153.000	-	-	1.190.625.494.757
142	Kota Bandar Lampung	65.325.409.425	18.758.195.000	1.065.851.338.000	39.502.740.170	302.817.504.524	-	-	5.480.252.000	-	-	1.497.735.439.119
143	Kota Metro	23.097.375.000	4.884.366.000	446.002.714.000	19.092.825.212	90.779.036.813	-	-	42.668.412.000	-	-	626.524.729.025
144	Kab. Pesawaran	23.213.965.400	4.930.103.000	634.676.295.000	57.052.805.800	189.627.885.512	130.559.000	141.548.213.000	11.612.178.000	-	-	1.062.792.004.712
145	Kab. Pringsewu	22.711.616.100	4.693.455.000	591.176.501.000	35.068.932.800	187.144.972.096	-	119.943.820.000	22.932.206.000	-	-	983.671.502.996
146	Kab. Mesuji	33.045.693.600	6.012.523.000	418.941.906.000	45.721.319.860	100.794.305.750	12.015.000	91.507.348.000	17.820.451.000	-	-	713.855.562.210
147	Kab. Tulang Bawang Barat	21.160.534.550	3.571.831.000	460.810.505.000	41.128.405.736	123.432.195.392	-	85.992.086.000	17.624.906.000	-	-	753.720.463.678
148	Kab. Pesisir Barat	23.177.971.720	4.097.884.000	419.730.538.000	34.442.480.050	86.294.386.100	-	94.625.929.000	21.751.813.000	-	-	684.121.001.870
149	Provinsi DKI Jakarta	15.307.589.887.000	5.721.471.365.000	22.179.718.000	3.076.020.400	3.055.368.539.005	1.735.248.701.390	-	35.175.027.000	-	-	25.880.109.257.795
150	Provinsi Jawa Barat	1.780.907.266.000	706.009.604.000	3.298.968.208.000	529.067.682.239	4.430.320.269.948	-	-	12.083.189.000	-	-	10.757.356.219.187
151	Kab. Bandung	422.650.377.000	194.052.090.000	2.120.513.691.000	234.603.206.934	996.408.822.164	1.721.792.636	369.782.772.050	36.149.309.000	-	-	4.375.882.060.784
152	Kab. Bekasi	442.520.118.000	165.791.009.000	1.206.835.341.000	80.828.296.035	789.461.835.709	-	256.985.104.000	22.341.836.000	-	-	2.964.763.539.744
153	Kab. Bogor	275.408.478.000	142.202.029.000	2.052.413.870.000	80.883.555.075	1.461.341.331.947	-	596.200.171.850	5.913.447.000	-	-	4.614.362.882.872
154	Kab. Ciamis	55.887.550.000	20.306.740.000	1.154.523.040.000	89.197.596.137	412.359.456.152	3.923.520.000	266.526.909.000	25.246.589.000	-	-	2.027.971.400.289
155	Kab. Cianjur	91.531.007.000	31.664.281.000	1.620.815.795.000	105.221.285.020	789.142.836.350	4.800.000.000	450.588.614.940	11.322.950.000	-	-	3.105.086.769.310
156	Kab. Cirebon	77.532.659.000	26.439.414.000	1.494.827.372.000	99.852.769.780	688.701.256.872	-	465.063.547.000	12.141.743.000	-	-	2.864.558.761.652
157	Kab. Garut	206.028.280.000	104.035.873.000	1.796.719.963.000	151.231.325.937	896.740.233.131	10.507.849.500	491.220.881.700	45.402.419.000	-	-	3.701.886.825.268
158	Kab. Indramayu	185.183.479.000	45.386.607.000	1.353.035.819.254	112.869.791.887	520.658.866.149	30.269.653.900	349.840.577.000	6.128.894.000	-	-	2.603.373.688.190
159	Kab. Karawang	410.408.493.750	115.641.000.000	1.298.893.930.000	94.974.879.597	651.549.495.477	8.256.000.000	352.304.937.000	5.720.980.000	-	-	2.937.749.715.824
160	Kab. Kuningan	53.478.608.000	20.708.400.000	1.151.041.030.000	90.399.118.635	475.035.860.841	5.287.120.850	352.599.938.000	12.942.270.000	-	-	2.161.492.346.326
161	Kab. Majalengka	89.408.514.000	22.606.221.000	1.169.589.214.000	72.213.705.353	451.274.075.240	156.125.500	328.530.155.000	-	-	-	2.133.778.010.093
162	Kab. Purwakarta	97.484.738.000	31.493.135.000	830.261.058.000	73.622.178.458	328.971.230.634	-	190.526.939.200	5.763.374.000	-	-	1.558.122.653.292
163	Kab. Subang	165.698.128.000	64.950.288.000	1.259.850.839.000	115.305.969.003	522.337.590.893	15.604.160.000	280.609.986.000	-	-	-	2.424.356.960.896
164	Kab. Sukabumi	152.930.436.000	104.935.176.000	1.617.746.547.000	188.955.880.580	724.660.959.426	10.390.996.000	446.761.470.000	11.838.424.000	-	-	3.258.219.889.006
165	Kab. Sumedang	104.200.539.000	30.557.511.000	1.095.966.940.000	81.093.831.761	446.181.728.958	537.133.033	277.350.642.100	12.018.294.000	-	-	2.047.906.619.852
166	Kab. Tasikmalaya	67.521.631.000	24.465.378.000	1.465.790.775.000	135.153.932.017	610.523.675.142	9.064.020.350	399.737.802.700	11.645.735.000	-	-	2.723.902.949.209
167	Kota Bandung	380.623.275.000	147.596.257.000	1.644.019.080.000	54.942.069.096	645.146.757.167	-	-	-	-	-	2.872.327.438.263
168	Kota Bekasi	151.368.985.000	55.815.950.000	1.222.256.920.000	34.243.980.406	575.104.521.516	-	-	6.185.659.500	-	-	2.044.976.016.422
169	Kota Bogor	90.371.738.000	27.640.792.000	793.077.597.000	55.796.999.805	298.780.741.220	-	-	5.912.254.000	-	-	1.271.580.122.025
170	Kota Cirebon	62.041.362.060	23.944.847.000	559.232.958.000	25.648.122.847	144.386.762.200	2.130.000.000	-	12.674.059.000	-	-	830.058.111.107
171	Kota Depok	106.453.508.725	42.374.206.000	925.319.419.639	27.984.140.767	433.507.068.335	-	-	36.723.423.000	-	-	1.572.361.766.466
172	Kota Sukabumi	59.090.805.000	23.169.823.000	488.738.244.000	15.787.902.529	121.812.589.023	1.500.000.000	-	18.439.215.000	-	-	728.538.578.552
173	Kota Tasikmalaya	58.967.075.340	21.424.241.000	777.026.475.000	35.812.567.200	245.408.922.723	-	-	-	-	-	1.138.639.281.263
174	Kota Cimahi	74.579.624.000	28.041.972.000	553.056.036.000	13.481.150.654	162.921.675.972	-	-	-	-	-	832.080.458.626
175	Kota Banjar	50.250.373.000	20.661.568.000	370.325.384.000	14.178.780.272	83.594.830.049	-	17.915.401.000	11.628.278.000	-	-	568.554.614.321
176	Kab. Bandung Barat	88.905.797.000	31.717.581.000	1.100.915.628.000	86.206.280.440	490.478.446.782	-	242.697.615.000	-	-	-	2.040.921.348.222
177	Kab. Pangandaran	54.580.788.000	21.334.539.000	527.505.534.000	33.845.756.074	146.471.158.926	-	97.251.765.650	34.866.264.000	-	-	915.855.805.650
178	Provinsi Jawa Tengah	863.693.643.000	111.172.485.000	3.558.429.343.000	404.100.292.842	3.296.494.807.319	54.495.623.308	-	87.197.945.000	-	-	8.375.584.139.469

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil		Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus			Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DIY				Total Transfer ke Daerah
		Tunai	Non Tunai		DAK Fisik	DAK Nonfisik	Hibah ke Daerah	Dana Desa	Insentif Fiskal	Otonomi Khusus	Keistemewaan DIY	
(1)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) +(13)
179	Kab. Banjarnegara	34.958.980.000	4.975.158.000	940.264.211.000	52.327.289.494	326.006.566.573	19.346.236.536	285.008.401.000	18.150.156.000	-	-	1.681.036.998.603
180	Kab. Banyumas	46.087.689.000	7.248.635.000	1.352.878.223.000	86.965.470.307	546.039.008.173	10.997.012.968	354.692.218.000	-	-	-	2.404.908.256.448
181	Kab. Batang	42.101.138.000	6.706.222.000	772.544.083.000	38.041.262.565	257.591.723.693	500.000.000	223.279.438.000	-	-	-	1.340.763.867.258
182	Kab. Blora	271.103.840.000	25.306.259.000	906.428.198.000	116.008.152.256	308.828.323.248	-	265.281.497.000	23.405.854.000	-	-	1.916.362.123.504
183	Kab. Boyolali	55.503.378.000	3.950.948.000	991.435.535.000	89.455.272.025	317.632.815.839	5.224.000.000	265.842.691.000	27.301.163.000	-	-	1.756.345.802.864
184	Kab. Brebes	36.947.614.000	6.011.579.000	1.331.823.262.000	108.573.506.917	506.251.252.584	14.553.262.500	334.083.744.600	5.837.859.000	-	-	2.344.082.080.601
185	Kab. Cilacap	54.995.338.000	8.492.821.000	1.341.034.645.000	120.890.096.969	552.989.625.790	23.309.328.200	328.544.506.300	5.897.922.000	-	-	2.436.154.283.259
186	Kab. Demak	67.037.808.000	4.213.236.000	872.507.328.203	67.798.319.975	345.022.028.866	10.410.000.000	262.545.878.000	31.244.228.000	-	-	1.660.778.827.044
187	Kab. Grobogan	56.604.486.000	5.355.529.000	1.083.349.488.000	92.495.894.311	417.727.841.381	5.950.000.000	311.445.783.000	23.366.776.000	-	-	1.996.295.797.692
188	Kab. Jepara	50.332.320.000	9.210.976.000	964.599.847.000	88.144.036.053	334.823.843.516	4.694.000.000	212.555.731.000	43.465.414.000	-	-	1.707.826.167.569
189	Kab. Karanganyar	47.430.776.000	7.181.765.000	935.257.078.000	104.072.462.190	338.173.564.192	6.650.000.000	180.205.977.000	5.890.883.500	-	-	1.624.862.505.882
190	Kab. Kebumen	34.389.477.000	3.776.820.000	1.240.100.218.000	49.510.073.990	460.729.109.898	1.520.109.562	455.959.893.200	11.805.728.000	-	-	2.257.791.429.650
191	Kab. Kendal	52.982.333.000	5.162.611.000	946.784.460.000	92.695.230.088	357.993.514.361	8.000.000.000	261.152.593.800	-	-	-	1.724.770.742.249
192	Kab. Klaten	48.701.597.000	3.660.267.000	1.209.485.753.000	63.086.397.870	385.717.744.993	1.200.000.000	380.301.846.000	11.882.483.000	-	-	2.104.036.088.863
193	Kab. Kudus	330.326.071.000	12.551.578.000	784.035.556.000	62.199.199.163	251.091.438.966	1.236.000.000	136.746.086.000	13.267.148.000	-	-	1.591.453.077.129
194	Kab. Magelang	41.868.985.000	3.114.338.000	1.022.706.418.000	102.749.475.887	353.949.984.267	18.454.635.298	363.989.464.000	-	-	-	1.906.833.300.452
195	Kab. Pati	39.921.909.000	6.428.760.000	1.161.834.190.000	90.256.974.731	386.246.647.087	1.487.221.845	382.478.377.000	16.828.112.000	-	-	2.085.482.191.663
196	Kab. Pekalongan	27.085.098.000	2.802.381.000	913.291.118.000	110.610.427.845	304.947.802.801	7.100.000.000	264.899.843.000	29.255.354.000	-	-	1.659.992.024.646
197	Kab. Pemalang	31.141.644.000	3.029.695.000	1.178.382.708.000	91.392.948.645	451.281.708.103	-	261.275.195.760	6.635.557.000	-	-	2.023.139.456.508
198	Kab. Purbalingga	30.744.080.000	3.743.121.000	874.090.181.000	70.069.270.422	331.370.459.891	10.123.664.184	254.557.923.000	12.201.947.000	-	-	1.586.900.646.497
199	Kab. Purworejo	29.731.922.000	3.251.713.000	957.937.703.000	48.952.081.524	286.481.446.539	1.645.020.161	384.401.231.000	31.653.321.000	-	-	1.744.054.438.224
200	Kab. Rembang	66.969.374.000	3.423.023.000	748.504.166.000	122.522.193.546	232.105.615.789	1.994.000.000	248.448.063.000	-	-	-	1.423.966.435.335
201	Kab. Semarang	42.768.518.000	5.322.545.000	941.477.806.000	91.253.545.969	340.275.828.819	-	205.979.019.000	5.900.646.000	-	-	1.632.977.908.788
202	Kab. Sragen	31.351.056.000	3.660.421.000	1.031.710.777.000	54.716.830.323	335.579.769.809	4.238.000.000	213.713.479.000	23.002.021.000	-	-	1.697.972.354.132
203	Kab. Sukoharjo	38.840.340.000	6.360.009.000	889.841.916.000	37.793.943.810	275.911.571.737	1.655.395.000	161.172.763.000	16.326.997.000	-	-	1.427.902.935.547
204	Kab. Tegal	35.763.005.000	5.809.587.000	1.146.423.105.000	74.468.758.496	454.725.693.477	9.457.995.000	307.953.560.600	5.841.384.000	-	-	2.040.443.088.573
205	Kab. Temanggung	71.326.471.000	3.462.370.000	791.518.719.000	109.544.079.906	277.372.507.081	-	242.462.582.000	29.383.259.000	-	-	1.525.069.987.987
206	Kab. Wonogiri	43.667.242.000	3.014.829.000	1.114.870.780.000	143.768.981.848	393.800.994.865	1.500.000.000	259.415.528.000	50.051.001.000	-	-	2.010.089.356.713
207	Kab. Wonosobo	35.634.220.000	3.254.662.000	832.226.959.000	161.079.696.095	308.181.144.140	48.671.356.930	247.153.737.000	13.020.711.000	-	-	1.649.222.486.165
208	Kota Magelang	29.776.613.000	4.272.416.000	430.702.497.000	35.795.497.981	70.583.860.840	1.992.203.000	-	52.522.739.000	-	-	625.645.826.821
209	Kota Pekalongan	30.800.722.000	4.009.608.000	451.200.064.000	52.410.414.846	111.663.146.683	1.788.000.000	-	21.278.579.000	-	-	673.150.534.529
210	Kota Salatiga	28.959.622.000	3.899.882.000	440.846.987.000	23.286.747.059	83.211.231.456	-	-	49.138.845.000	-	-	629.343.314.515
211	Kota Semarang	170.343.642.000	44.741.960.000	1.208.489.774.000	66.329.848.159	434.498.277.036	-	-	14.615.779.000	-	-	1.939.019.280.195
212	Kota Surakarta	57.446.442.000	10.555.425.000	809.189.028.000	16.412.444.897	214.380.225.977	900.000.000	-	-	-	-	1.108.883.565.874
213	Kota Tegal	30.857.989.000	4.116.957.000	473.320.096.000	22.617.077.830	109.029.013.623	-	-	-	-	-	639.941.133.453
214	Provinsi DI Yogyakarta	94.360.276.000	28.295.461.000	1.267.722.324.000	134.151.614.382	502.022.052.490	-	-	80.876.155.000	-	1.372.725.809.224	3.480.153.692.096
215	Kab. Bantul	30.854.018.000	8.760.647.000	954.691.198.000	56.576.626.350	313.847.281.469	7.080.000.000	126.479.025.000	58.809.566.000	-	-	1.557.098.361.819
216	Kab. Gunung Kidul	18.071.867.000	3.309.236.000	912.985.994.000	74.024.339.759	315.554.286.634	5.974.000.000	179.933.551.000	5.952.497.000	-	-	1.515.805.771.393
217	Kab. Kulon Progo	16.701.489.000	3.747.148.000	677.190.992.000	83.812.884.604	213.906.235.561	8.000.000.000	104.694.668.000	54.259.365.000	-	-	1.162.312.782.165
218	Kab. Sleman	57.059.939.000	17.167.904.000	971.845.015.000	23.251.738.208	348.681.946.640	9.524.649.805	124.203.563.500	48.593.705.000	-	-	1.600.328.461.153
219	Kota Yogyakarta	48.262.352.930	11.136.602.000	641.277.045.000	13.825.807.247	158.653.692.760	-	-	82.504.747.000	-	-	955.660.246.937
220	Provinsi Jawa Timur	2.601.820.540.500	715.465.543.000	3.902.918.762.000	524.847.542.564	3.634.393.490.409	-	-	71.891.089.000	-	-	11.451.336.967.473
221	Kab. Bangkalan	82.021.377.150	21.555.352.000	978.219.538.000	49.979.019.188	340.997.612.506	-	310.628.711.997	6.037.277.000	-	-	1.789.438.887.841
222	Kab. Banyuwangi	171.598.114.000	44.795.757.000	1.372.167.079.000	88.271.742.193	455.751.097.821	7.822.476.000	229.305.443.700	53.412.589.000	-	-	2.423.124.298.714
223	Kab. Blitar	91.445.018.000	21.762.798.000	1.095.038.464.000	65.170.825.017	342.684.070.013	-	234.905.666.000	28.489.581.000	-	-	1.879.496.422.030
224	Kab. Bojonegoro	2.906.782.662.830	1.503.222.992.000	915.027.723.000	31.486.932.421	355.597.180.668	-	406.556.846.275	11.524.031.000	-	-	6.130.198.368.194
225	Kab. Bondowoso	127.567.314.000	22.764.523.000	882.034.701.000	100.481.994.423	254.107.295.015	-	224.397.404.000	-	-	-	1.611.353.231.438
226	Kab. Gresik	179.781.977.000	56.018.040.000	915.604.394.000	122.396.553.183	348.227.442.293	3.890.000.000	318.788.865.000	-	-	-	1.944.707.271.476
227	Kab. Jember	196.976.063.000	26.774.509.000	1.705.657.780.000	45.036.717.101	581.366.922.328	936.104.334	322.996.582.400	-	-	-	2.879.744.678.163
228	Kab. Jombang	265.916.339.830	35.541.556.000	1.053.946.286.000	58.893.045.011	364.080.728.993	-	315.572.884.000	19.475.868.000	-	-	2.113.426.707.834
229	Kab. Kediri	152.733.641.960	22.487.103.000	1.207.834.770.000	50.252.906.793	436.407.268.605	721.452.668	381.287.893.345	5.700.953.000	-	-	2.257.425.989.371
230	Kab. Lamongan	280.277.350.000	31.581.308.000	1.139.279.612.000	125.254.014.967	367.204.738.220	1.410.368.400	419.493.131.000	42.914.751.000	-	-	2.407.415.273.587
231	Kab. Lumajang	91.220.647.000	21.817.693.000	941.070.088.564	60.316.911.291	302.652.220.534	3.103.656.870	218.497.691.000	-	-	-	1.638.678.908.259
232	Kab. Madiun	238.715.174.000	31.889.963.000	836.412.017.000	66.957.817.039	228.386.827.185	6.026.250.000	196.676.956.000	6.099.626.000	-	-	1.611.164.630.224
233	Kab. Magetan	84.013.819.390	20.444.179.000	878.380.199.000	26.947.807.345	240.542.165.635	9.676.513.092	191.794.890.000	39.969.879.000	-	-	1.491.769.452.462
234	Kab. Malang	210.037.665.000	28.887.347.000	1.666.272.306.000	88.582.620.305	630.155.496.596	21.723.499.500	462.622.095.000	22.916.865.000	-	-	3.131.197.894.401
235	Kab. Mojokerto	97.197.897.000	27.487.490.000	947.529.087.000	42.385.338.681	309.632.642.961	-	294.196.059.900	-	-	-	1.718.428.515.542
236	Kab. Nganjuk	246.284.100.000	32.129.868.000	1.032.810.599.000	80.527.573.246	342.434.412.938	3.000.000.000	271.045.569.200	5.823.334.000	-	-	2.014.055.456.384
237	Kab. Ngawi	248.390.530.000	37.029.278.000	1.012.239.753.000	119.030.977.685	287.916.401.192	10.826.125.000	235.855.938.000	5.887.334.000	-	-	1.957.176.336.877
238	Kab. Pacitan	81.894.277.000	20.328.443.000	768.332.196.000	87.622.209.155	229.345.817.146	1.582.000.000	171.988.044.000	5.942.102.000	-	-	1.367.035.088.301

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil		Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus			Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DIY				Total Transfer ke Daerah
		Tunai	Non Tunai		DAK Fisik	DAK Nonfisik	Hibah ke Daerah	Dana Desa	Insentif Fiskal	Otonomi Khusus	Keistemewaan DIY	
(1)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) +(13)
239	Kab. Pamekasan	166.935.785.000	22.873.536.000	829.734.424.000	67.983.349.914	285.079.126.863	732.000.000	202.286.998.000	5.589.509.000	-	-	1.581.214.728.777
240	Kab. Pasuruan	446.871.180.000	37.986.560.000	1.159.792.291.000	81.902.795.975	429.756.000.668	-	349.825.662.500	11.644.350.000	-	-	2.517.778.840.143
241	Kab. Ponorogo	94.389.567.000	21.653.735.000	1.029.023.990.000	47.966.673.563	307.341.114.409	2.904.000.000	263.442.388.000	-	-	-	1.766.721.467.972
242	Kab. Probolinggo	152.046.732.000	21.453.132.000	970.203.151.000	18.739.331.481	301.910.661.734	1.460.000.000	344.672.757.000	6.019.863.000	-	-	1.816.505.628.215
243	Kab. Sampang	89.755.680.000	20.066.581.000	820.292.037.000	83.629.005.681	302.300.161.750	-	228.702.990.000	-	-	-	1.544.746.455.431
244	Kab. Sidoarjo	202.350.806.000	51.903.687.000	1.188.771.254.000	87.814.802.226	531.643.548.467	2.727.000.000	322.178.934.000	21.357.443.000	-	-	2.408.747.474.693
245	Kab. Situbondo	129.341.924.000	23.245.694.000	781.496.438.000	66.141.130.899	247.907.161.870	-	150.869.238.300	5.399.419.000	-	-	1.404.401.006.069
246	Kab. Sumenep	127.920.094.000	13.119.148.000	1.131.047.470.000	159.432.637.289	311.406.223.199	14.065.734.099	359.620.929.000	-	-	-	2.116.612.235.587
247	Kab. Trenggalek	86.049.525.000	22.154.972.000	862.719.233.000	45.908.758.050	244.189.475.277	4.797.280.395	165.882.571.000	42.011.238.000	-	-	1.473.713.052.722
248	Kab. Tuban	642.257.790.000	63.031.433.000	1.007.415.729.000	131.434.669.190	336.142.889.920	158.662.500	306.929.122.900	6.111.031.000	-	-	2.493.481.327.510
249	Kab. Tulungagung	99.127.337.000	22.178.584.000	1.115.338.308.000	50.053.940.239	353.655.124.899	-	251.734.117.000	6.225.400.000	-	-	1.898.312.811.138
250	Kota Blitar	83.819.725.000	21.548.666.000	417.456.513.000	9.770.554.691	68.710.251.995	-	-	53.546.779.000	-	-	654.852.489.686
251	Kota Kediri	239.358.469.000	26.696.573.000	596.568.695.000	19.862.225.972	108.367.097.229	-	-	6.772.434.000	-	-	997.625.494.201
252	Kota Madiun	87.024.656.730	22.841.760.000	487.288.274.000	5.699.869.054	86.193.862.816	-	-	74.714.922.000	-	-	763.763.344.600
253	Kota Malang	148.512.775.000	31.669.421.000	826.764.923.000	15.967.259.384	236.209.303.697	-	-	22.160.938.000	-	-	1.281.284.620.081
254	Kota Mojokerto	84.793.854.910	21.593.036.000	390.468.477.000	59.676.281.059	69.028.074.410	-	-	36.545.526.000	-	-	662.105.249.379
255	Kota Pasuruan	81.310.504.790	20.504.552.000	427.302.348.000	34.244.880.377	87.318.152.879	222.000.000	-	15.680.060.000	-	-	666.582.498.046
256	Kota Probolinggo	85.194.355.430	20.848.861.000	451.957.137.000	9.746.975.796	81.783.656.461	-	-	-	-	-	649.530.985.687
257	Kota Surabaya	517.385.919.000	153.363.840.000	1.231.162.911.000	24.935.715.998	755.843.282.629	-	-	30.523.723.000	-	-	2.713.215.391.627
258	Kota Batu	78.276.629.580	21.037.896.000	470.126.282.000	6.446.324.347	76.315.502.009	-	20.668.338.000	38.774.970.000	-	-	711.645.941.936
259	Provinsi Kalimantan Barat	372.042.599.020	148.157.927.000	1.697.438.951.000	344.852.804.495	573.876.453.181	57.883.865.264	-	6.199.742.000	-	-	3.200.452.341.960
260	Kab. Bengkayang	59.857.351.000	21.452.944.000	578.328.041.000	182.008.336.572	160.615.434.136	-	110.069.022.000	10.605.976.000	-	-	1.122.937.104.708
261	Kab. Landak	58.655.508.550	17.246.363.000	655.525.851.000	100.331.253.761	183.328.484.719	540.000.000	155.614.525.000	14.956.842.000	-	-	1.186.198.828.030
262	Kab. Kapuas Hulu	90.462.508.825	30.337.698.000	924.278.715.000	87.192.364.246	173.073.288.400	-	248.770.492.800	-	-	-	1.554.115.067.271
263	Kab. Ketapang	320.584.790.850	138.710.356.000	1.091.068.698.000	114.987.829.184	271.488.154.294	1.320.520.000	253.420.738.150	6.103.901.000	-	-	2.197.684.987.478
264	Kab. Mempawah	33.821.361.110	13.924.175.000	556.889.798.000	57.902.292.022	126.593.746.430	-	61.127.714.000	5.438.024.000	-	-	855.697.110.562
265	Kab. Sambas	47.201.873.850	15.450.655.000	884.772.980.000	113.503.162.350	274.908.236.066	30.073.909.804	184.385.908.000	-	-	-	1.550.296.725.070
266	Kab. Sanggau	235.695.308.850	138.972.013.000	790.867.392.000	113.442.789.115	202.769.029.642	1.131.850.000	157.083.453.900	-	-	-	1.639.961.836.507
267	Kab. Sintang	129.046.952.850	40.804.437.000	891.501.307.000	89.331.513.594	264.767.347.503	4.500.000.000	341.667.038.870	26.486.795.000	-	-	1.788.105.391.817
268	Kota Pontianak	69.576.942.200	31.538.257.000	710.591.805.000	26.557.214.143	183.259.897.755	7.500.000.000	-	12.840.204.000	-	-	1.041.864.320.098
269	Kota Singkawang	31.469.171.110	11.766.381.000	478.163.909.000	43.304.250.229	94.814.578.578	-	-	14.810.529.000	-	-	674.328.818.917
270	Kab. Sekadau	64.594.010.110	25.284.440.000	485.424.959.000	53.107.711.529	102.507.076.149	-	82.979.130.000	-	-	-	813.897.326.788
271	Kab. Melawi	52.289.206.850	16.770.244.000	573.675.755.000	109.595.785.730	136.406.438.269	-	152.772.193.000	16.860.579.000	-	-	1.058.370.201.849
272	Kab. Kayong Utara	47.356.074.000	12.328.829.000	464.000.226.000	62.006.021.396	77.828.593.156	-	43.968.061.563	9.943.767.000	-	-	717.431.572.115
273	Kab. Kubu Raya	75.436.265.850	28.092.296.000	788.990.219.000	125.709.962.169	236.950.141.725	2.000.000.000	119.199.655.800	12.362.633.000	-	-	1.388.741.173.544
274	Provinsi Kalimantan Tengah	1.567.633.743.000	1.350.967.665.000	1.493.895.271.000	314.049.763.832	347.774.127.288	-	-	38.617.660.000	-	-	5.112.938.230.120
275	Kab. Barito Selatan	334.867.292.600	383.647.853.000	535.152.039.000	70.945.605.212	97.615.029.244	-	72.180.332.350	2.824.632.500	-	-	1.497.232.783.906
276	Kab. Barito Utara	997.227.322.800	1.285.497.837.000	519.181.671.000	84.255.485.379	112.428.034.000	-	76.583.107.000	5.794.231.000	-	-	3.080.967.688.179
277	Kab. Kapuas	939.677.766.000	780.699.471.000	808.731.231.000	155.922.847.825	226.520.370.375	492.000.000	186.839.388.000	-	-	-	3.098.883.074.200
278	Kab. Kotawaringin Barat	183.509.701.000	189.044.489.000	616.439.358.000	104.795.413.809	132.430.520.127	648.000.000	75.749.087.000	17.333.161.000	-	-	1.319.949.729.936
279	Kab. Kotawaringin Timur	331.807.886.000	259.176.249.000	805.177.949.000	32.967.221.235	196.646.347.832	-	153.858.559.000	22.293.407.000	-	-	1.801.927.619.067
280	Kota Palangkaraya	133.562.844.700	182.091.844.000	615.520.038.000	36.180.579.044	128.795.460.606	1.752.906.664	-	6.598.785.000	-	-	1.104.502.458.014
281	Kab. Katingan	175.822.380.000	168.696.224.000	649.645.064.000	138.035.682.119	131.274.669.547	-	135.105.046.000	6.264.924.000	-	-	1.404.843.989.666
282	Kab. Seruyan	210.894.638.000	200.199.861.000	580.016.319.000	55.546.371.251	85.953.782.274	-	94.487.656.000	-	-	-	1.227.098.627.525
283	Kab. Sukamara	133.219.497.000	176.334.592.000	397.543.187.000	26.194.721.023	39.229.078.327	-	26.472.195.000	10.019.416.000	-	-	809.012.686.350
284	Kab. Lamandau	163.688.568.340	173.480.070.000	435.998.756.000	48.810.084.704	69.053.001.802	-	68.082.862.000	10.378.377.000	-	-	969.491.719.846
285	Kab. Gunung Mas	248.332.186.000	247.067.925.000	529.366.223.000	72.770.345.330	115.581.871.642	-	95.043.161.190	15.456.199.000	-	-	1.323.617.911.162
286	Kab. Pulang Pisau	175.751.546.000	192.556.718.000	540.067.121.000	87.353.239.709	100.548.555.346	-	81.340.442.000	26.777.560.000	-	-	1.204.395.182.055
287	Kab. Murung Raya	890.720.910.400	963.767.301.000	637.630.012.000	68.253.683.794	112.101.273.350	-	110.859.253.000	-	-	-	2.783.332.433.544
288	Kab. Barito Timur	177.843.660.000	184.092.199.000	457.131.089.000	52.417.638.397	86.610.821.939	-	77.935.147.800	-	-	-	1.036.030.556.136
289	Provinsi Kalimantan Selatan	2.168.270.273.000	1.612.721.359.000	1.131.610.774.000	289.438.401.648	422.798.322.649	70.346.700	-	47.059.823.000	-	-	5.671.969.299.997
290	Kab. Banjar	560.944.647.000	357.621.928.000	720.930.446.000	118.711.313.776	228.210.843.847	2.444.000.000	222.580.763.000	5.672.424.000	-	-	2.217.116.365.623
291	Kab. Barito Kuala	281.411.883.000	245.299.597.000	552.680.130.000	92.797.566.827	178.421.924.512	59.635.000	155.015.700.000	5.792.351.000	-	-	1.511.478.787.339
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	345.678.932.000	173.569.500.000	491.370.004.000	104.943.218.466	126.192.272.087	108.000.000	111.423.331.000	39.043.184.000	-	-	1.392.328.441.553
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	297.258.150.000	251.364.951.000	495.099.857.000	42.447.638.277	124.205.309.108	491.901.200	127.021.976.000	5.743.384.000	-	-	1.343.633.166.585
294	Kab. Hulu Sungai Utara	321.981.506.650	263.221.153.000	463.640.223.000	49.415.656.457	111.821.774.551	-	160.337.302.285	12.297.367.000	-	-	1.382.714.982.943
295	Kab. Kotabaru	982.284.239.000	882.639.739.000	607.214.564.000	49.311.048.232	148.790.056.994	-	167.208.742.000	-	-	-	2.837.448.389.226
296	Kab. Tabalong	805.792.346.000	507.471.836.000	467.386.771.000	47.030.532.569	142.832.094.765	3.962.209.421	101.081.537.000	42.449.877.000	-	-	2.118.007.203.755
297	Kab. Tanah Laut	675.313.736.000	254.106.551.000	512.108.210.000	66.466.496.948	166.462.543.759	-	112.845.982.320	-	-	-	1.787.303.520.027
298	Kab. Tapin	579.998.342.000	521.293.932.000	432.453.256.000	44.566.527.275	102.762.572.817	34.400.000	97.150.986.586	-	-	-	1.778.260.016.678

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil		Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus			Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DIY				Total Transfer ke Daerah
		Tunai	Non Tunai		DAK Fisik	DAK Nonfisik	Hibah ke Daerah	Dana Desa	Insentif Fiskal	Otonomi Khusus	Keistemewaan DIY	
(1)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) +(13)
299	Kota Banjarbaru	244.330.049.000	222.217.233.000	427.949.305.000	28.894.434.860	110.003.668.558	-	-	28.796.644.000	-	-	1.062.191.334.418
300	Kota Banjarmasin	234.059.126.730	218.360.399.000	722.322.927.000	19.869.921.263	203.704.855.183	1.488.000.000	-	34.356.178.000	-	-	1.434.161.407.176
301	Kab. Balangan	1.261.241.426.790	1.267.834.043.000	361.852.722.000	46.040.531.309	82.079.292.550	600.000.000	112.897.928.300	16.166.958.000	-	-	3.148.712.901.949
302	Kab. Tanah Bumbu	1.749.376.875.000	1.463.369.409.000	444.216.202.000	64.938.465.766	142.806.532.637	419.319.072	122.424.918.000	18.608.839.000	-	-	4.006.160.560.475
303	Provinsi Kalimantan Timur	5.074.334.088.000	3.956.519.134.000	857.324.247.800	185.061.506.345	480.954.240.878	-	-	-	-	-	10.554.193.217.023
304	Kab. Berau	1.947.543.347.000	1.552.613.597.000	566.612.593.000	52.763.540.954	118.536.373.050	-	93.677.389.000	-	-	-	4.331.746.840.004
305	Kab. Kutai Kartanegara	4.751.708.226.000	4.075.331.955.000	494.247.485.000	110.616.686.334	368.873.393.323	3.567.000.000	192.420.471.000	27.486.716.000	-	-	10.024.251.932.657
306	Kab. Kutai Barat	1.895.139.121.775	1.490.732.421.000	563.284.779.000	4.187.669.450	87.378.880.332	522.000.000	162.209.439.000	5.834.115.000	-	-	4.209.288.425.557
307	Kab. Kutai Timur	3.726.516.136.000	3.141.128.519.000	579.740.639.000	51.166.480.257	190.831.649.267	4.500.000.000	146.660.086.500	9.306.588.000	-	-	7.849.850.098.024
308	Kab. Paser	1.511.265.068.000	1.004.400.295.000	377.450.591.750	94.136.143.628	140.283.296.677	-	120.380.001.400	21.562.638.000	-	-	3.269.478.034.455
309	Kota Balikpapan	871.333.980.000	765.437.552.000	471.137.362.000	9.239.248.876	207.681.065.433	951.000.000	-	41.601.904.000	-	-	2.367.382.112.309
310	Kota Bontang	1.044.708.564.000	815.976.751.000	240.568.341.000	9.498.072.964	70.939.027.632	-	-	16.446.800.000	-	-	2.198.137.556.596
311	Kota Samarinda	837.162.025.140	776.672.527.000	726.445.568.000	33.979.871.380	264.146.357.823	-	-	16.333.666.000	-	-	2.654.740.015.343
312	Kab. Penajam Paser Utara	898.445.932.200	721.587.354.000	287.311.660.000	56.150.254.530	92.925.793.808	1.117.682.811	29.452.924.000	5.913.954.000	-	-	2.092.905.555.349
313	Kab. Mahakam Ulu	917.762.328.000	959.597.362.000	458.952.273.000	52.387.489.710	23.989.032.180	-	48.260.654.012	10.599.493.000	-	-	2.471.548.631.902
314	Provinsi Sulawesi Utara	115.090.233.000	38.820.017.000	1.391.710.108.000	335.435.196.455	394.478.627.561	118.634.302	-	33.579.296.000	-	-	2.309.232.112.318
315	Kab. Bolaang Mongondow	37.432.075.000	12.209.622.000	534.329.126.000	113.708.772.524	114.193.278.534	342.325.200	152.964.788.000	14.914.122.000	-	-	980.094.109.258
316	Kab. Minahasa	35.572.266.000	20.271.880.000	650.492.909.000	41.435.566.583	162.443.032.315	-	174.085.342.000	10.478.235.000	-	-	1.094.779.230.898
317	Kab. Sangihe	12.841.473.000	3.588.070.000	515.081.173.000	43.045.289.060	91.799.965.800	500.000.000	107.491.407.902	-	-	-	774.347.378.762
318	Kota Bitung	42.881.085.000	13.303.346.000	483.353.331.000	27.038.872.350	81.141.671.558	-	-	24.376.556.000	-	-	672.094.861.908
319	Kota Manado	45.794.836.000	10.256.330.000	749.852.642.000	35.004.243.654	156.509.704.652	-	-	-	-	-	997.417.756.306
320	Kab. Kepulauan Talaud	10.614.289.000	3.212.349.000	476.905.794.000	113.380.139.322	78.615.765.836	-	106.419.433.000	16.532.445.000	-	-	805.680.215.158
321	Kab. Minahasa Selatan	13.612.395.800	6.236.277.000	524.681.043.000	71.602.745.422	127.561.710.000	18.517.439.072	127.606.962.000	19.518.880.000	-	-	909.337.452.294
322	Kota Tomohon	26.955.655.000	19.605.305.000	408.998.612.000	19.715.255.661	55.292.731.480	-	-	20.353.343.000	-	-	550.920.902.141
323	Kab. Minahasa Utara	53.854.494.000	15.670.555.000	485.656.137.000	121.157.580.151	104.888.078.730	-	98.526.285.276	15.385.759.000	-	-	895.138.889.157
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulan	8.915.439.000	3.026.836.000	378.748.745.000	13.386.447.613	39.851.794.608	-	61.234.795.000	16.371.034.000	-	-	521.535.091.221
325	Kota Kotamobagu	12.090.010.150	4.188.530.000	370.215.116.000	10.546.566.350	52.821.602.927	-	13.009.817.000	5.807.022.000	-	-	468.678.664.427
326	Kab. Bolaang Mongondow Ut	10.830.046.450	4.061.483.000	365.750.838.000	61.946.075.435	51.001.656.681	-	78.926.577.000	5.890.177.000	-	-	578.406.853.566
327	Kab. Minahasa Tenggara	9.771.984.000	3.948.233.000	396.623.013.000	23.753.411.939	70.401.073.822	-	99.269.669.000	10.399.061.000	-	-	614.166.445.761
328	Kab. Bolaang Mongondow Tir	10.821.889.000	3.999.547.000	339.596.203.000	38.113.084.315	43.074.151.297	-	61.170.584.000	-	-	-	496.775.458.612
329	Kab. Bolaang Mongondow Se	22.726.064.000	6.999.505.000	345.342.407.000	26.481.608.264	43.270.820.621	-	61.905.121.000	6.313.683.000	-	-	513.039.208.885
330	Provinsi Sulawesi Tengah	449.710.376.600	543.010.826.000	1.561.233.206.000	382.481.075.916	401.638.583.073	3.775.515.621	-	5.603.665.500	-	-	3.347.453.248.710
331	Kab. Banggai	570.021.346.925	703.624.362.000	840.890.670.000	64.442.425.432	189.277.832.738	5.641.246.503	227.030.227.000	20.281.195.000	-	-	2.621.209.305.598
332	Kab. Banggai Kepulauan	39.860.715.500	74.416.041.000	459.904.491.000	55.071.492.302	81.366.693.929	-	111.415.896.000	5.734.069.000	-	-	827.769.398.731
333	Kab. Buol	48.603.608.400	70.076.514.000	497.088.200.000	36.836.924.810	78.258.619.129	3.715.438.034	91.419.056.000	11.905.188.000	-	-	837.903.548.373
334	Kab. Tolitoli	46.334.900.500	69.764.444.000	603.134.063.000	124.878.887.210	111.901.516.695	2.830.154.400	93.090.125.000	5.802.208.000	-	-	1.057.736.298.805
335	Kab. Donggala	47.788.606.300	75.434.693.000	648.794.084.000	121.960.475.157	166.187.637.740	750.000.000	143.271.351.604	14.542.879.000	-	-	1.218.729.726.801
336	Kab. Morowali	515.788.048.200	487.347.579.000	477.818.042.000	57.960.526.910	92.043.521.500	-	104.761.178.944	42.497.206.000	-	-	1.778.216.102.554
337	Kab. Poso	59.161.727.500	79.178.073.000	700.471.444.000	67.914.286.731	130.922.786.507	7.922.611.981	120.893.347.000	10.479.181.000	-	-	1.176.943.457.719
338	Kota Palu	59.293.988.100	84.317.533.000	667.266.186.000	102.487.426.907	165.918.598.227	-	-	5.674.436.000	-	-	1.084.958.168.234
339	Kab. Parigi Moutong	47.372.294.975	74.535.553.000	777.148.164.000	210.878.154.045	234.570.328.531	2.756.127.007	241.123.454.500	9.429.858.000	-	-	1.597.813.934.058
340	Kab. Tojo Una Una	122.841.383.500	79.893.000.000	566.048.075.000	105.409.293.801	106.266.611.878	2.693.331.842	114.710.250.000	49.620.369.000	-	-	1.147.482.315.021
341	Kab. Sigi	43.474.405.000	69.324.439.000	604.814.048.000	159.845.498.097	147.160.113.265	-	152.166.403.000	27.805.695.000	-	-	1.204.590.601.362
342	Kab. Banggai Laut	41.657.294.500	74.906.963.000	403.125.099.000	36.693.205.835	48.815.110.460	-	51.097.994.750	6.215.496.000	-	-	662.511.163.545
343	Kab. Morowali Utara	239.866.636.000	206.031.564.000	555.126.249.000	42.255.915.242	88.227.480.067	-	110.554.350.000	-	-	-	1.242.062.194.309
344	Provinsi Sulawesi Selatan	295.028.429.000	79.464.958.000	2.529.076.029.000	266.596.196.619	1.168.526.582.842	3.990.214.198	-	71.472.744.000	-	-	4.414.155.153.659
345	Kab. Bantaeng	9.909.079.000	2.939.553.000	490.771.029.000	43.509.867.106	120.452.746.020	5.284.256.539	41.310.806.000	17.047.140.000	-	-	731.224.476.665
346	Kab. Barru	10.955.277.000	2.639.516.000	499.568.872.000	38.885.902.382	115.982.418.478	-	38.739.622.000	-	-	-	706.771.607.860
347	Kab. Bone	20.876.800.000	4.077.075.000	1.088.077.784.000	153.946.444.445	375.656.417.601	388.085.000	287.820.801.350	13.308.076.000	-	-	1.944.151.483.396
348	Kab. Bulukumba	13.516.161.000	3.090.703.000	705.160.439.000	174.343.200.253	209.546.106.353	462.000.000	99.064.338.200	10.377.309.000	-	-	1.215.560.256.806
349	Kab. Enrekang	11.797.154.000	2.529.635.000	518.114.851.878	132.996.840.736	152.408.633.803	-	96.923.567.000	15.625.741.000	-	-	930.396.423.417
350	Kab. Gowa	14.488.707.000	4.286.511.000	880.701.578.000	112.231.284.439	288.888.292.000	-	117.841.448.307	23.405.120.000	-	-	1.441.842.940.746
351	Kab. Jeneponto	10.592.983.000	2.380.498.000	643.081.319.000	35.362.887.490	180.813.566.617	-	82.197.107.200	6.569.635.000	-	-	960.997.996.307
352	Kab. Luwu	14.398.623.000	2.958.471.000	696.920.131.000	109.863.351.924	205.309.617.395	2.737.701.426	179.315.608.000	26.515.937.000	-	-	1.238.019.440.745
353	Kab. Luwu Utara	27.408.167.000	5.762.668.000	661.149.803.000	60.392.075.464	156.236.772.627	3.804.076.000	153.576.765.000	12.444.883.000	-	-	1.080.775.210.091
354	Kab. Maros	16.236.526.000	3.464.214.000	703.105.074.000	100.590.633.464	185.527.964.770	-	78.490.716.000	17.659.868.000	-	-	1.105.074.996.234
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	27.454.253.400	3.874.710.000	742.332.198.000	134.234.092.286	212.263.202.199	2.000.000.000	65.102.177.990	17.797.293.000	-	-	1.205.057.926.875
356	Kota Palopo	15.126.605.000	4.133.761.000	504.787.511.000	40.727.924.665	96.299.360.667	-	-	5.930.155.000	-	-	667.005.317.332
357	Kab. Luwu Timur	245.060.188.050	96.766.663.000	538.151.782.000	25.834.967.779	132.800.357.534	7.514.910.174	110.838.130.000	11.794.502.000	-	-	1.168.761.500.537
358	Kab. Pinrang	12.990.208.000	2.441.812.000	705.908.546.000	43.686.573.267	198.189.066.161	57.109.900	69.961.304.300	16.484.913.000	-	-	1.049.719.532.628

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil		Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus			Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DIY				Total Transfer ke Daerah
		Tunai	Non Tunai		DAK Fisik	DAK Nonfisik	Hibah ke Daerah	Dana Desa	Insentif Fiskal	Otonomi Khusus	Keistemewaan DIY	
(1)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (7) + (8) + (9)+ (10) + (11) + (12) +(13)
359	Kab. Sinjai	12.142.526.000	2.578.507.000	564.679.932.000	141.244.062.442	156.971.414.862	-	62.931.678.000	13.957.880.000	-	-	954.506.000.304
360	Kab. Kepulauan Selayar	16.184.170.000	2.400.199.000	584.427.974.000	31.419.707.650	110.663.419.347	-	68.245.693.000	-	-	-	813.341.162.997
361	Kab. Sidenreng Rappang	13.850.942.100	2.739.325.000	603.941.085.000	71.096.621.617	169.055.884.647	1.794.000.000	60.898.941.000	20.900.516.000	-	-	944.277.315.364
362	Kab. Soppeng	18.558.101.000	3.026.723.000	599.459.445.000	101.014.558.984	142.905.251.937	109.496.570	46.704.934.000	11.649.633.000	-	-	923.428.143.491
363	Kab. Takalar	12.552.865.000	3.121.918.000	589.369.151.000	90.081.625.629	165.435.538.072	-	67.993.500.000	5.740.914.000	-	-	934.295.511.701
364	Kab. Tana Toraja	10.994.292.000	2.723.182.000	572.280.749.000	79.460.004.990	160.598.338.707	-	104.378.742.000	21.071.841.000	-	-	951.507.149.697
365	Kab. Wajo	41.250.269.000	5.619.228.000	712.422.725.000	125.265.725.567	205.462.950.588	1.141.524.160	119.082.791.000	31.670.716.000	-	-	1.241.915.929.315
366	Kota Parepare	12.728.079.160	3.148.577.000	445.715.665.000	65.244.248.080	79.907.764.465	-	-	28.262.493.000	-	-	635.006.826.705
367	Kota Makassar	128.276.317.000	42.196.356.000	1.397.783.060.400	36.340.464.421	444.756.115.216	-	-	-	-	-	2.049.352.313.037
368	Kab. Toraja Utara	10.875.653.000	2.623.905.000	532.824.757.000	53.592.234.024	161.472.646.170	-	100.570.285.000	2.979.885.500	-	-	864.939.365.694
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	551.422.061.000	516.868.370.000	1.526.829.523.000	374.677.845.729	507.170.020.224	2.043.022.600	-	-	-	-	3.479.010.842.553
370	Kab. Buton	27.314.742.000	43.440.641.000	411.084.676.000	66.828.394.789	81.298.731.205	-	65.035.538.800	-	-	-	695.002.723.794
371	Kab. Konawe	178.044.882.100	112.744.043.000	677.760.284.000	139.107.999.343	184.002.862.990	2.173.338.172	218.978.282.000	-	-	-	1.512.811.691.605
372	Kab. Kolaka	427.236.652.000	161.883.496.000	561.623.351.000	96.275.014.605	123.422.456.194	4.613.024.050	81.488.233.105	15.767.840.000	-	-	1.472.310.066.954
373	Kab. Muna	31.922.255.050	43.885.243.000	633.217.918.000	112.682.713.946	194.888.473.400	-	104.930.863.000	-	-	-	1.121.527.466.396
374	Kota Kendari	60.585.894.000	56.105.511.000	653.680.504.000	78.995.243.041	164.279.714.637	-	-	17.095.535.000	-	-	1.030.742.401.678
375	Kota Bau-bau	25.853.666.000	43.450.237.000	503.662.475.000	127.426.879.572	100.687.496.063	-	-	-	-	-	801.080.753.635
376	Kab. Konawe Selatan	165.839.749.000	168.317.643.000	692.465.648.000	116.311.418.887	182.784.339.096	-	264.295.359.000	9.383.684.000	-	-	1.599.397.840.983
377	Kab. Bombana	162.743.092.000	156.168.838.000	469.190.581.000	57.368.240.596	122.851.608.760	-	97.776.291.000	-	-	-	1.066.098.651.356
378	Kab. Wakatobi	26.686.656.000	42.849.757.000	457.907.066.000	102.579.411.521	91.236.416.199	3.198.000.000	61.640.608.000	5.947.093.000	-	-	792.045.007.720
379	Kab. Kolaka Utara	103.078.234.185	145.771.289.000	470.995.239.000	52.276.336.249	95.105.134.730	4.125.468.450	107.186.190.850	22.186.038.000	-	-	1.000.723.930.464
380	Kab. Konawe Utara	607.111.931.300	683.009.307.000	439.043.488.000	50.554.731.704	77.230.453.000	-	119.400.224.000	15.181.018.000	-	-	1.991.531.153.004
381	Kab. Buton Utara	26.724.616.800	42.988.995.000	400.571.180.000	78.105.256.959	62.342.640.693	-	61.116.609.000	-	-	-	671.849.298.452
382	Kab. Konawe Kepulauan	24.481.211.000	46.104.468.000	315.936.310.000	69.883.510.111	34.542.744.318	-	65.129.304.000	11.754.042.000	-	-	567.831.589.429
383	Kab. Kolaka Timur	68.447.255.200	63.005.352.000	394.551.883.000	41.608.912.563	81.846.969.430	-	92.708.644.000	-	-	-	742.169.016.193
384	Kab. Muna Barat	27.155.832.000	42.842.428.000	354.371.067.000	60.126.525.397	80.045.218.388	-	66.015.798.000	-	-	-	630.556.868.785
385	Kab. Buton Tengah	49.703.571.475	66.063.202.000	355.344.063.000	83.921.812.223	78.552.138.000	-	56.546.729.000	5.795.324.000	-	-	695.926.839.698
386	Kab. Buton Selatan	24.700.048.750	42.676.372.000	350.577.402.000	44.603.654.621	61.864.421.459	-	50.215.599.000	-	-	-	574.637.497.830
387	Provinsi Bali	136.756.533.200	34.598.578.000	1.244.707.789.000	94.198.493.352	579.529.779.834	-	-	67.892.976.000	-	-	2.157.684.149.386
388	Kab. Badung	49.207.992.425	22.707.570.000	349.967.198.636	7.305.129.366	208.523.858.686	-	47.887.856.200	59.373.863.000	-	-	744.973.468.313
389	Kab. Bangli	11.859.875.110	2.222.161.000	548.551.128.000	135.907.190.828	114.379.354.870	-	60.083.252.000	30.884.546.000	-	-	903.887.507.808
390	Kab. Buleleng	21.399.609.625	4.005.067.000	932.744.543.000	63.640.144.462	307.011.677.006	-	132.727.227.000	37.499.147.000	-	-	1.499.027.415.093
391	Kab. Gianyar	17.386.014.970	5.199.805.000	661.656.132.000	7.170.713.481	181.028.691.968	848.900.704	68.054.916.000	10.490.443.000	-	-	951.835.617.123
392	Kab. Jembrana	14.464.086.845	4.387.200.000	536.261.628.000	2.943.049.770	110.740.144.465	-	42.554.456.000	33.830.584.000	-	-	745.181.149.080
393	Kab. Karangasem	14.256.303.000	2.443.146.000	725.487.789.000	6.905.970.332	221.536.001.041	-	79.383.744.000	21.860.366.000	-	-	1.071.873.319.373
394	Kab. Klungkung	13.377.540.925	2.294.817.000	516.451.973.000	102.526.224.590	110.648.932.732	-	47.843.257.000	25.474.546.000	-	-	818.617.291.247
395	Kab. Tabanan	17.467.501.500	3.346.836.000	772.956.907.000	21.607.724.102	186.811.513.150	24.000.000	117.628.512.000	5.960.430.000	-	-	1.125.803.423.752
396	Kota Denpasar	83.345.361.210	22.939.483.000	633.506.842.000	11.251.952.213	217.930.414.096	-	33.881.756.000	53.953.685.000	-	-	1.056.809.493.519
397	Provinsi Nusa Tenggara Bara	433.365.782.000	200.902.626.000	1.623.630.483.000	306.852.319.835	617.284.246.560	10.233.268	-	-	-	-	3.182.045.690.663
398	Kab. Bima	55.114.868.700	33.493.766.000	908.869.279.000	194.816.235.093	269.934.178.429	3.275.652.125	190.157.200.000	-	-	-	1.655.661.179.347
399	Kab. Dompu	54.722.308.950	33.473.423.000	566.091.912.000	119.298.409.287	126.579.039.961	764.996.000	71.658.985.000	11.702.980.000	-	-	984.292.054.198
400	Kab. Lombok Barat	56.939.387.000	35.600.559.000	798.705.074.000	78.801.112.886	255.773.676.793	3.000.000.000	143.291.094.000	6.193.142.000	-	-	1.378.304.045.679
401	Kab. Lombok Tengah	113.207.323.800	33.854.649.000	1.047.472.659.000	149.737.378.651	365.993.044.816	53.025.943	166.892.819.000	5.734.038.000	-	-	1.882.944.938.210
402	Kab. Lombok Timur	122.045.296.000	33.556.082.000	1.196.368.692.000	228.547.937.638	480.345.844.170	14.733.679.000	284.288.270.989	5.860.379.000	-	-	2.365.746.180.797
403	Kab. Sumbawa	215.006.857.000	88.958.408.000	854.651.427.000	158.162.374.831	236.426.871.528	28.654.298.098	152.202.830.000	11.447.687.000	-	-	1.745.510.753.457
404	Kota Mataram	135.204.009.000	40.827.876.000	621.774.459.000	89.596.603.839	155.211.039.615	3.750.000.000	-	50.129.084.000	-	-	1.096.493.071.454
405	Kota Bima	52.054.714.000	33.048.937.000	453.951.601.000	42.423.553.167	85.699.394.970	-	-	21.172.210.000	-	-	688.350.410.137
406	Kab. Sumbawa Barat	580.354.510.900	438.670.046.000	388.776.015.000	52.923.143.183	94.368.736.979	1.472.000.000	49.329.862.000	9.646.695.000	-	-	1.615.541.009.062
407	Kab. Lombok Utara	50.775.141.000	32.783.616.000	403.743.750.000	88.485.195.965	104.721.550.600	2.840.000.000	63.225.544.000	33.459.859.000	-	-	780.034.656.565
408	Provinsi Nusa Tenggara Timu	49.212.197.000	11.028.543.000	1.876.608.978.000	460.078.252.346	805.764.320.512	1.094.002.649	-	-	-	-	3.203.786.293.507
409	Kab. Alor	6.996.892.490	633.088.000	597.469.930.000	118.801.505.951	137.323.876.736	1.870.000.000	134.401.170.000	26.662.525.000	-	-	1.024.158.988.177
410	Kab. Belu	4.672.917.000	711.114.000	490.426.520.000	124.363.968.363	122.872.138.528	2.977.700.415	64.370.256.000	21.126.761.000	-	-	831.521.375.306
411	Kab. Ende	9.019.353.950	1.635.309.000	622.119.754.000	71.439.403.812	148.123.993.940	-	210.467.635.770	-	-	-	1.062.805.450.472
412	Kab. Flores Timur	7.325.196.000	759.569.000	616.246.259.000	108.044.563.225	148.207.011.139	-	180.183.689.349	-	-	-	1.060.766.287.713
413	Kab. Kupang	7.712.848.000	847.161.000	671.886.757.000	139.085.857.056	191.331.481.601	4.065.975.781	153.099.304.000	17.501.458.000	-	-	1.185.530.842.438
414	Kab. Lembata	5.428.567.000	557.216.000	456.993.936.000	101.002.738.778	77.772.983.461	-	124.903.067.000	16.834.736.000	-	-	783.493.244.239
415	Kab. Manggarai	8.037.909.570	1.810.508.000	596.299.361.000	131.686.954.206	190.199.459.621	3.825.000.000	127.982.480.000	5.809.126.000	-	-	1.065.650.798.397
416	Kab. Ngada	4.385.774.000	630.465.000	462.715.625.000	96.003.317.503	108.774.097.759	-	107.579.648.000	-	-	-	780.088.927.262
417	Kab. Sikka	8.322.176.790	1.152.604.000	619.573.611.000	88.688.789.277	177.235.936.256	-	136.087.827.000	-	-	-	1.031.060.944.323
418	Kab. Sumba Barat	4.129.237.000	558.545.000	393.087.240.000	150.844.638.101	61.678.098.000	-	59.750.038.000	30.066.851.000	-	-	700.114.647.101

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil		Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus			Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DIY				Total Transfer ke Daerah
		Tunai	Non Tunai		DAK Fisik	DAK Nonfisik	Hibah ke Daerah	Dana Desa	Insentif Fiskal	Otonomi Khusus	Keistemewaan DIY	
(1)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) +(13)
419	Kab. Sumba Timur	9.540.624.000	1.327.561.000	632.850.539.000	132.221.921.163	138.183.616.652	-	138.950.764.000	28.624.228.000	-	-	1.081.699.253.815
420	Kab. Timor Tengah Selatan	4.938.711.000	566.614.000	769.287.174.000	198.112.497.836	205.231.171.055	-	250.455.378.400	20.126.677.000	-	-	1.448.718.223.291
421	Kab. Timor Tengah Utara	4.668.145.900	730.089.000	584.194.195.189	75.286.355.814	161.896.816.610	-	147.552.503.900	-	-	-	974.328.106.413
422	Kota Kupang	21.199.340.000	4.508.529.000	660.918.921.000	22.979.066.414	152.755.688.383	-	-	-	-	-	862.361.544.797
423	Kab. Rote Ndao	5.554.046.000	468.781.000	438.961.153.000	159.090.994.820	104.379.524.332	-	107.810.890.000	16.751.396.000	-	-	833.016.785.152
424	Kab. Manggarai Barat	7.960.239.000	1.014.560.000	533.243.373.000	340.856.707.562	155.465.567.159	839.276.502	145.594.391.000	5.799.334.000	-	-	1.190.773.448.223
425	Kab. Nagekeo	4.394.451.000	523.448.000	429.596.722.000	45.537.537.448	86.252.105.257	-	81.928.920.000	5.904.794.000	-	-	654.137.977.705
426	Kab. Sumba Barat Daya	4.912.083.000	581.403.000	503.064.938.000	200.621.098.674	177.847.281.217	-	187.540.421.000	19.751.646.000	-	-	1.094.318.870.891
427	Kab. Sumba Tengah	3.709.436.000	376.303.000	348.741.122.000	116.831.916.721	57.317.169.350	-	66.732.475.800	26.343.370.000	-	-	620.051.792.871
428	Kab. Manggarai Timur	4.650.099.000	642.455.000	523.366.021.000	238.941.839.387	184.361.927.737	-	157.447.150.500	27.470.913.000	-	-	1.136.880.405.624
429	Kab. Sabu Raijua	4.234.005.680	367.515.000	354.686.749.000	98.108.941.054	64.083.533.747	-	62.145.670.550	24.713.757.000	-	-	608.340.172.031
430	Kab. Malaka	3.802.902.000	492.315.000	442.936.788.000	170.513.991.175	109.681.410.918	-	115.598.346.000	25.219.701.000	-	-	868.245.454.093
431	Provinsi Maluku	71.985.612.000	8.255.731.000	1.578.790.923.000	401.876.591.216	342.145.274.528	-	-	-	-	-	2.403.054.131.744
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	13.039.698.950	1.612.017.000	545.279.122.000	67.466.922.283	74.789.907.498	-	70.721.433.000	13.751.146.000	-	-	786.660.246.731
433	Kab. Maluku Tengah	28.738.361.000	3.178.172.000	942.146.285.000	150.975.039.124	223.382.336.571	2.078.000.000	173.367.490.503	-	-	-	1.523.865.684.198
434	Kab. Maluku Tenggara	8.437.826.000	693.927.000	472.015.431.000	222.663.255.505	89.745.702.373	-	148.569.795.000	6.207.486.000	-	-	948.333.422.878
435	Kab. Buru	8.322.307.100	1.060.567.000	480.305.086.135	55.802.847.217	106.935.107.539	-	76.916.354.400	-	-	-	729.342.269.391
436	Kota Ambon	22.002.352.000	3.990.620.000	659.681.580.000	24.819.609.212	151.977.239.872	-	31.457.579.000	11.840.063.000	-	-	905.769.043.084
437	Kab. Seram Bagian Barat	11.047.112.000	844.394.000	584.966.194.000	66.264.080.888	133.932.655.484	-	91.561.512.925	14.084.507.000	-	-	902.700.456.297
438	Kab. Seram Bagian Timur	46.575.539.000	4.357.929.000	521.224.937.000	92.957.790.002	116.728.633.664	-	160.981.079.000	12.792.733.000	-	-	955.618.640.666
439	Kab. Kepulauan Aru	13.053.195.000	1.599.015.000	575.190.528.100	85.546.188.309	97.927.043.720	-	103.653.383.000	4.250.354.000	-	-	881.219.707.129
440	Kota Tual	7.485.782.000	761.110.000	381.453.061.000	29.210.081.550	46.700.037.490	-	23.329.951.286	-	-	-	488.940.023.326
441	Kab. Maluku Barat Daya	24.347.817.000	10.013.275.000	552.580.915.000	77.876.896.857	73.932.842.856	-	103.734.301.000	25.005.351.000	-	-	867.491.398.713
442	Kab. Buru Selatan	13.995.599.000	829.097.000	418.817.378.000	48.524.677.955	63.605.287.995	-	69.566.238.000	11.542.629.000	-	-	626.880.906.950
443	Provinsi Papua	265.223.003.000	113.286.170.000	824.236.308.000	178.036.462.636	23.614.073.700	-	-	-	1.051.198.658.000	-	2.455.594.675.336
444	Kab. Biak Numfor	42.438.691.000	11.970.693.000	565.463.262.000	207.622.458.820	139.595.435.293	-	191.607.849.000	-	150.471.601.000	-	1.309.169.990.113
445	Kab. Jayapura	52.734.577.000	12.163.132.000	662.344.224.412	124.114.253.656	138.960.322.601	-	120.885.139.000	-	177.102.511.000	-	1.288.304.159.669
446	Kab. Jayawijaya	38.696.628.000	11.724.355.000	698.268.155.000	212.671.067.243	135.748.393.965	-	269.928.305.000	18.459.872.000	191.465.907.000	-	1.576.962.683.208
447	Kab. Merauke	75.504.374.000	16.783.540.000	1.181.484.951.000	196.125.065.578	202.880.938.977	920.000.000	187.527.260.988	-	215.936.091.000	-	2.077.162.221.543
448	Kab. Mimika	1.983.188.616.050	623.874.194.000	583.757.242.000	52.104.542.172	170.439.151.417	-	130.605.281.000	-	154.356.998.000	-	3.698.326.024.639
449	Kab. Nabire	48.723.502.250	12.823.790.000	696.141.488.000	182.019.470.856	162.656.805.392	-	77.226.711.000	25.369.083.000	140.361.128.000	-	1.345.321.978.498
450	Kab. Paniai	100.056.311.000	36.936.208.000	562.017.902.000	80.850.031.196	142.199.755.468	-	193.500.413.000	19.126.594.000	168.474.166.000	-	1.303.161.380.664
451	Kab. Puncak Jaya	37.641.764.550	12.084.901.450	715.482.355.646	212.691.421.450	39.349.414.950	-	285.584.761.000	15.126.261.000	224.935.101.000	-	1.542.895.981.046
452	Kab. Kepulauan Yapen	41.823.226.000	11.813.061.000	539.461.978.000	144.778.502.373	104.751.704.127	-	122.409.975.000	-	141.429.794.000	-	1.106.468.240.500
453	Kota Jayapura	86.581.471.000	39.353.303.000	640.401.636.000	48.296.020.730	172.644.571.996	-	11.481.961.408	-	169.383.243.000	-	1.168.142.207.134
454	Kab. Sarmi	45.082.743.850	17.719.133.000	656.418.155.000	68.665.614.367	46.404.979.374	-	88.110.756.000	-	132.962.716.000	-	1.055.364.097.591
455	Kab. Keerom	49.511.065.000	15.110.978.000	514.482.387.000	68.991.342.965	68.377.220.915	-	80.560.098.000	19.126.594.000	114.802.120.000	-	930.961.805.880
456	Kab. Yahukimo	39.662.267.000	12.401.520.000	733.045.228.000	353.833.361.771	164.780.496.731	-	440.434.121.000	16.709.726.000	297.928.897.000	-	2.058.795.617.502
457	Kab. Pegunungan Bintang	42.812.811.000	13.149.537.000	792.845.364.000	164.932.434.594	85.708.341.700	-	237.837.594.000	11.750.979.000	185.240.858.000	-	1.534.277.919.294
458	Kab. Tolikara	37.117.322.000	12.630.049.000	704.329.677.000	164.318.084.282	99.134.438.052	-	423.167.940.000	9.834.153.000	190.796.567.000	-	1.641.328.230.334
459	Kab. Boven Digoel	52.716.110.000	13.207.167.000	775.308.995.000	55.667.417.766	67.182.785.036	-	116.409.743.000	12.501.042.000	138.364.334.000	-	1.231.357.593.802
460	Kab. Mappi	42.526.620.000	12.294.821.000	727.070.861.450	136.013.054.140	106.933.646.900	-	177.422.554.000	12.501.042.000	238.884.479.000	-	1.453.647.078.490
461	Kab. Asmat	102.799.107.000	35.266.235.000	846.702.530.000	116.111.393.640	107.806.391.607	-	232.769.646.000	21.126.761.000	212.694.942.000	-	1.675.277.006.247
462	Kab. Waropen	39.085.235.450	12.309.958.000	543.831.949.000	105.025.340.550	50.205.930.777	-	84.938.124.000	8.167.347.000	112.941.130.000	-	956.505.014.777
463	Kab. Supiori	38.379.852.000	11.963.789.000	428.508.732.000	94.552.139.451	31.926.874.764	-	28.108.582.200	21.003.430.000	79.420.020.000	-	733.863.419.415
464	Kab. Mamberamo Raya	39.166.828.750	12.219.544.000	694.034.042.000	93.330.318.516	38.965.952.000	-	70.850.665.000	10.209.184.000	174.381.088.000	-	1.133.157.622.266
465	Kab. Mamberamo Tengah	38.240.349.000	12.050.754.000	614.064.013.000	56.159.564.467	31.924.080.000	-	49.452.196.000	6.750.563.000	93.598.209.000	-	902.239.728.467
466	Kab. Yalimo	37.462.994.000	12.321.700.000	583.255.853.000	72.751.000.300	44.265.818.650	-	227.043.943.000	7.417.285.000	108.106.309.000	-	1.092.624.902.950
467	Kab. Lanny Jaya	36.410.227.000	12.140.893.000	622.037.473.000	253.545.899.000	95.903.145.633	-	336.190.923.000	23.100.489.000	209.424.039.000	-	1.588.753.088.633
468	Kab. Nduga	99.205.058.000	38.494.256.000	580.968.245.000	139.946.940.024	33.871.472.300	-	208.348.932.000	10.459.205.000	133.262.434.000	-	1.244.556.542.324
469	Kab. Dogiyai	100.549.769.000	36.536.473.000	474.629.655.000	103.990.866.411	60.988.993.148	-	91.414.451.000	10.834.236.000	106.097.465.000	-	985.041.908.559
470	Kab. Puncak	99.974.385.000	37.322.920.000	762.649.062.000	170.212.364.486	23.427.471.100	-	195.934.333.000	15.501.292.000	268.420.855.000	-	1.573.442.682.586
471	Kab. Intan Jaya	100.454.183.000	35.584.521.000	651.606.900.000	83.068.726.719	28.716.476.150	-	103.322.718.000	15.288.205.000	130.374.470.000	-	1.148.416.199.869
472	Kab. Deiyai	100.326.201.000	37.485.608.000	468.091.149.000	96.308.113.930	68.651.707.640	-	65.522.539.000	9.834.153.000	126.253.696.000	-	972.473.167.570
473	Provinsi Maluku Utara	476.216.078.000	449.907.171.000	1.266.273.434.900	341.539.481.357	220.375.658.371	-	-	12.833.375.000	-	-	2.767.145.198.628
474	Kab. Halmahera Tengah	774.671.965.000	584.649.949.000	430.120.620.185	60.931.720.733	51.921.016.377	-	50.695.829.000	5.689.821.000	-	-	1.958.680.921.295
475	Kota Ternate	43.983.533.500	72.534.473.000	609.216.898.000	58.104.997.938	98.719.078.918	-	-	30.386.501.000	-	-	912.945.482.356
476	Kab. Halmahera Barat	44.756.469.000	70.277.837.000	475.330.173.000	39.162.822.884	93.638.012.073	-	131.996.607.000	6.390.338.000	-	-	861.552.258.957
477	Kab. Halmahera Timur	223.507.666.000	538.148.473.000	463.389.663.000	84.108.090.337	61.521.036.116	-	90.059.876.200	16.253.308.000	-	-	1.476.988.112.653
478	Kab. Halmahera Selatan	328.969.364.050	203.529.146.000	720.078.357.240	158.645.500.322	165.351.661.193	1.998.000.000	206.565.958.411	25.896.124.000	-	-	1.811.034.111.216

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil		Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus			Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DIY				Total Transfer ke Daerah
		Tunai	Non Tunai		DAK Fisik	DAK Nonfisik	Hibah ke Daerah	Dana Desa	Insentif Fiskal	Otonomi Khusus	Keistemewaan DIY	
(1)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (7) + (8) + (9)+ (10) + (11) + (12) +(13)
479	Kab. Halmahera Utara	50.839.899.800	13.556.111.000	469.884.148.000	79.947.438.167	101.278.407.332	2.876.000.000	150.623.717.000	2.928.504.500	-	-	871.934.225.799
480	Kab. Kepulauan Sula	40.003.890.000	68.131.866.000	468.923.627.000	164.332.022.514	71.975.545.456	-	66.432.311.992	19.126.594.000	-	-	898.925.856.962
481	Kota Tidore Kepulauan	137.263.665.750	107.694.322.000	523.326.935.000	139.891.385.564	71.022.598.654	-	39.605.868.000	37.471.803.000	-	-	1.056.276.577.968
482	Kab. Pulau Morotai	35.866.505.750	71.958.673.000	378.528.286.000	177.600.837.573	62.067.500.253	-	68.544.651.000	24.251.281.000	-	-	818.817.734.576
483	Kab. Pulau Taliabu	71.081.122.600	85.163.879.000	346.285.997.000	84.101.024.423	54.941.014.000	-	58.869.676.000	19.788.331.000	-	-	720.231.044.023
484	Provinsi Banten	663.072.987.000	306.265.677.000	1.108.754.329.733	137.858.268.059	1.026.072.183.168	-	-	45.278.197.000	-	-	3.287.301.641.960
485	Kab. Lebak	67.982.159.000	29.804.381.000	1.068.865.609.000	50.208.365.734	469.336.735.104	17.746.780.662	354.640.034.000	-	-	-	2.058.584.064.500
486	Kab. Pandeglang	64.044.925.000	27.902.683.000	1.158.878.754.000	95.786.351.550	460.611.884.837	63.518.000	331.794.102.000	-	-	-	2.139.082.218.387
487	Kab. Serang	91.183.859.000	46.961.406.000	1.066.900.341.000	87.132.804.322	485.142.630.756	48.275.000	324.409.539.000	24.535.866.000	-	-	2.126.314.721.078
488	Kab. Tangerang	256.436.758.000	143.925.208.000	1.226.736.668.000	76.607.546.382	768.240.032.616	-	336.886.617.000	6.477.097.000	-	-	2.815.309.926.998
489	Kota Cilegon	114.628.313.000	39.626.429.000	609.411.521.000	28.997.859.171	152.410.101.697	-	-	-	-	-	945.074.223.868
490	Kota Tangerang	266.523.939.000	87.448.787.000	893.606.364.000	10.347.097.928	438.259.576.826	-	-	5.385.758.000	-	-	1.701.571.522.754
491	Kota Serang	72.557.192.000	29.690.234.000	628.404.907.000	40.632.234.465	228.371.234.400	-	-	26.251.215.000	-	-	1.025.907.016.865
492	Kota Tangerang Selatan	210.108.484.000	89.546.935.000	591.099.798.000	29.684.942.691	327.584.087.099	-	-	29.005.073.000	-	-	1.277.029.319.790
493	Provinsi Bangka Belitung	256.009.609.000	84.925.786.000	973.788.835.000	124.183.308.680	173.959.469.084	-	-	33.908.568.000	-	-	1.646.775.575.764
494	Kab. Bangka	151.803.508.000	44.350.781.000	507.707.987.000	32.199.382.548	130.851.541.156	354.000.000	57.863.983.000	18.244.339.000	-	-	943.375.521.704
495	Kab. Belitung	99.469.406.000	29.333.592.000	469.570.334.000	69.464.145.429	87.544.492.820	-	40.466.853.100	41.029.718.000	-	-	836.878.541.349
496	Kota Pangkal Pinang	78.281.695.000	26.544.027.000	439.857.545.000	90.605.528.202	81.590.070.746	-	-	12.106.347.000	-	-	728.985.212.948
497	Kab. Bangka Selatan	129.077.025.000	56.538.660.000	450.464.467.000	170.438.167.792	97.533.832.306	-	46.472.036.000	14.779.833.000	-	-	965.304.021.098
498	Kab. Bangka Tengah	96.368.874.000	28.468.869.000	432.884.306.000	34.618.692.350	95.989.481.020	-	50.883.326.000	37.597.452.000	-	-	776.811.000.370
499	Kab. Bangka Barat	114.216.373.000	43.275.635.000	434.686.031.000	47.331.879.395	99.512.205.178	452.000.000	54.434.722.000	26.956.967.000	-	-	820.865.812.573
500	Kab. Belitung Timur	108.335.957.000	31.723.821.000	431.105.388.444	15.453.308.952	77.429.731.884	-	38.883.640.000	26.408.103.000	-	-	729.339.950.280
501	Provinsi Gorontalo	22.357.025.320	6.527.121.000	979.869.891.000	140.281.348.223	176.917.596.975	1.234.701.108	-	30.445.345.000	-	-	1.357.633.028.626
502	Kab. Boalemo	9.833.931.000	3.947.200.000	441.506.759.000	82.015.800.451	88.058.604.481	-	72.534.933.400	9.867.253.000	-	-	707.764.481.332
503	Kab. Gorontalo	9.783.450.980	2.483.413.000	661.496.353.000	104.634.057.646	194.251.932.525	8.925.881.073	168.040.351.000	5.944.899.000	-	-	1.155.560.338.224
504	Kota Gorontalo	11.830.961.000	2.456.810.000	502.239.582.000	39.115.900.875	93.380.844.002	-	-	44.837.310.000	-	-	693.861.407.877
505	Kab. Pohuwato	10.840.173.000	2.990.574.000	498.470.107.000	91.484.648.248	90.274.517.655	4.188.637.350	86.083.963.735	20.240.694.000	-	-	804.573.314.988
506	Kab. Bone Bolango	6.921.864.850	2.405.419.000	471.845.488.000	59.423.730.435	103.256.259.956	4.068.377.299	122.626.132.000	12.267.000.000	-	-	782.814.271.540
507	Kab. Gorontalo Utara	7.552.885.280	999.985.000	396.085.125.000	67.061.031.321	85.496.880.911	-	95.434.159.000	5.888.177.000	-	-	658.518.243.512
508	Provinsi Kepulauan Riau	343.298.847.125	296.247.350.000	1.131.182.073.000	299.220.452.769	287.543.122.625	-	-	6.693.745.000	-	-	2.364.185.590.519
509	Kab. Natuna	207.586.377.925	281.593.517.000	407.503.851.000	115.479.222.997	65.055.724.310	1.254.000.000	53.850.434.000	30.674.314.000	-	-	1.162.997.441.232
510	Kab. Kepulauan Anambas	155.916.970.070	189.433.774.000	383.891.391.000	100.946.353.790	46.107.395.301	-	39.126.062.000	16.356.155.000	-	-	931.778.101.161
511	Kab. Karimun	112.595.092.120	92.569.531.000	432.627.923.000	102.790.173.874	121.711.549.665	1.070.000.000	37.646.768.000	28.554.463.000	-	-	929.565.500.659
512	Kota Batam	185.901.380.425	126.900.772.000	690.211.077.000	27.872.252.899	349.911.119.202	-	-	18.995.288.000	-	-	1.399.791.889.526
513	Kota Tanjung Pinang	78.107.065.925	72.302.378.000	464.484.498.000	27.957.726.393	93.694.602.547	-	-	27.666.976.000	-	-	764.213.246.865
514	Kab. Lingga	76.443.682.670	70.835.093.000	461.085.189.732	54.751.149.440	82.330.027.348	1.280.000.000	63.457.450.966	11.963.329.000	-	-	822.145.922.156
515	Kab. Bintan	83.966.521.020	73.240.129.000	493.791.884.000	26.740.078.812	93.620.239.671	-	31.699.703.000	25.865.193.000	-	-	828.923.748.503
516	Provinsi Papua Barat	2.758.289.807.000	227.477.903.000	645.931.585.000	96.988.675.708	8.799.266.000	-	-	-	1.011.942.246.000	-	4.749.429.482.708
517	Kab. Fak Fak	120.411.707.000	41.495.607.000	672.684.938.000	101.638.056.848	81.386.586.317	-	121.319.045.000	-	170.183.951.000	-	1.309.119.891.165
518	Kab. Manokwari	57.009.727.900	26.976.573.000	533.927.963.000	144.654.139.498	138.367.171.153	-	130.413.035.000	-	242.994.031.000	-	1.274.342.640.551
519	Kab. Sorong	191.294.936.550	65.122.890.000	529.768.821.000	221.304.100.145	132.969.274.267	-	169.538.080.200	18.220.852.000	127.460.101.000	-	1.455.679.055.162
520	Kota Sorong	55.755.762.000	32.231.529.000	511.393.788.000	42.141.237.576	117.633.470.363	-	-	-	210.729.342.000	-	969.885.128.939
521	Kab. Raja Ampat	115.171.662.000	87.438.538.000	672.765.495.000	169.561.226.657	79.297.079.511	-	94.852.583.000	-	285.148.587.000	-	1.504.235.171.168
522	Kab. Sorong Selatan	90.554.981.100	29.747.533.000	457.816.904.000	143.705.270.738	82.957.443.500	-	77.367.898.800	30.310.384.000	182.735.547.000	-	1.095.195.962.138
523	Kab. Teluk Bintuni	1.176.788.311.000	568.839.292.000	519.714.416.000	99.952.567.688	68.915.147.303	-	103.209.977.000	16.793.066.000	150.012.204.000	-	2.704.224.980.991
524	Kab. Teluk Wondama	85.445.398.700	29.142.180.000	443.838.860.000	188.773.624.149	42.629.641.715	-	64.590.528.000	16.418.035.000	178.010.950.000	-	1.048.849.217.564
525	Kab. Kaimana	165.896.242.000	53.738.742.000	596.271.929.000	30.801.503.910	61.793.410.750	-	84.393.767.000	-	170.984.170.000	-	1.163.879.764.660
526	Kab. Maybrat	84.150.816.650	29.698.537.000	421.049.520.000	137.293.562.017	42.723.602.477	-	188.115.468.000	17.084.757.000	238.252.978.000	-	1.158.369.241.144
527	Kab. Tambrauw	85.137.564.800	29.824.280.000	483.430.848.000	170.583.064.280	42.078.367.834	-	166.719.639.000	17.793.149.000	174.280.700.000	-	1.169.847.612.914
528	Kab. Manokwari Selatan	83.061.911.000	29.845.308.000	336.698.688.000	77.085.480.400	35.993.861.173	-	49.740.256.000	13.834.486.000	139.039.994.000	-	765.299.984.573
529	Kab. Pegunungan Arfak	82.134.227.000	29.515.365.000	363.163.580.000	96.687.359.186	46.641.478.972	-	128.921.849.000	12.542.712.000	238.012.294.000	-	997.618.865.158
530	Provinsi Sulawesi Barat	22.358.346.000	4.089.035.000	1.013.155.822.000	308.579.832.429	198.991.871.941	-	-	8.620.508.000	-	-	1.555.795.415.370
531	Kab. Majene	6.954.607.000	745.205.000	508.607.852.000	78.097.585.458	124.224.478.110	1.002.000.000	55.815.279.000	-	-	-	775.447.006.568
532	Kab. Mamuju	18.305.391.100	3.250.231.000	621.343.740.000	145.064.625.180	158.372.835.739	3.767.000.000	85.572.902.000	10.176.284.000	-	-	1.045.853.009.019
533	Kab. Polewali Mandar	10.503.078.000	1.101.497.000	705.779.281.000	166.576.237.546	206.510.731.200	2.926.000.000	144.190.872.000	5.632.014.000	-	-	1.243.219.710.746
534	Kab. Mamasa	5.534.775.000	506.121.000	507.206.087.000	147.226.205.281	128.683.627.442	1.912.000.000	139.208.794.000	-	-	-	930.277.609.723
535	Kab. Pasangkayu	22.226.942.850	2.348.030.000	473.352.431.000	104.368.130.391	83.210.281.341	-	53.799.805.000	-	-	-	739.305.620.582
536	Kab. Mamuju Tengah	13.403.806.000	756.691.000	349.661.889.000	101.224.309.437	72.684.138.350	-	51.720.040.000	6.018.759.000	-	-	595.469.632.787
537	Provinsi Kalimantan Utara	556.607.712.000	470.885.257.000	1.117.056.623.000	169.325.171.177	106.150.747.219	-	-	24.666.327.000	-	-	2.444.691.837.396
538	Provinsi Papua Tengah	201.580.460.100	54.990.366.000	497.778.420.000	17.222.847.722	2.707.735.000	-	-	-	1.106.892.273.000	-	1.881.172.101.822

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil		Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus			Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DIY				Total Transfer ke Daerah
		Tunai	Non Tunai		DAK Fisik	DAK Nonfisik	Hibah ke Daerah	Dana Desa	Insentif Fiskal	Otonomi Khusus	Keistemewaan DIY	
(1)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (7) + (8) + (9)+ (10) + (11) + (12) +(13)
539	Provinsi Papua Selatan	316.141.058.000	90.150.969.000	493.333.258.000	42.310.431.045	1.437.543.500	-	-	-	676.146.315.000	-	1.619.519.574.545
540	Provinsi Papua Pegunungan	189.136.691.400	50.703.692.000	443.146.538.000	27.354.756.950	-	-	-	-	1.182.864.644.000	-	1.893.206.322.350
541	Provinsi Papua Barat Daya	1.142.465.433.000	14.047.519.000	613.266.787.000	-	1.488.356.223	-	-	-	956.503.417.000	-	2.727.771.512.223
542	Kab. Bulungan	499.711.894.000	391.216.152.000	544.189.834.000	69.270.694.032	96.407.097.320	-	74.255.212.000	26.675.829.000	-	-	1.701.726.712.352
543	Kab. Malinau	996.860.638.000	585.670.612.000	809.470.515.000	74.637.163.936	65.557.075.282	-	117.636.673.000	-	-	-	2.649.832.677.218
544	Kab. Nunukan	364.894.573.000	435.222.997.000	522.734.182.000	158.605.087.337	113.227.466.516	-	179.186.422.500	-	-	-	1.773.870.728.353
545	Kota Tarakan	216.781.996.000	192.785.111.000	438.920.698.000	28.567.452.502	88.816.772.050	3.000.000.000	-	23.343.638.000	-	-	992.215.667.552
546	Kab. Tana Tidung	546.734.558.000	447.431.068.000	423.147.090.000	30.709.657.008	22.740.915.974	-	29.655.371.000	5.806.329.000	-	-	1.506.224.988.982
Jumlah		132.775.700.804.180	72.890.863.216.450	398.029.628.594.542	50.334.741.347.305	128.081.946.376.309	2.940.874.059.627	69.856.768.617.317	7.906.031.813.500	17.241.263.570.000	1.372.725.809.224	881.430.544.208.454

205.666.564.020.630

128.081.946.376.309,00

-

RINCIAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK LAINNYA
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAK Nonfisik										Total Penerimaan Bukan Pajak Lainnya
		Potongan SPM										
		Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dana Pelayanan Kepariwisataan	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	
(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14) = 5+6+7+8+9+10+11+12+13+14
1	Provinsi Aceh	-	720.129.913	40.133.343	56.462.936	-	-	42.368.900	-	85.181.682	-	944.276.774
2	Kab. Aceh Barat	705.572.918	3.674.365.365	-	48.925.140	15.471.000	-	-	-	-	-	4.444.907.738
3	Kab. Aceh Besar	2.139.672.481	4.531.653.000	-	5.603.250	29.762.120	-	-	-	-	-	6.796.433.543
4	Kab. Aceh Selatan	1.227.351.489	3.961.133.377	-	19.468.390	12.711.030	-	-	-	54.200	-	5.235.483.936
5	Kab. Aceh Singkil	266.844.800	747.999.746	-	64.429.200	2.400	-	-	-	-	-	1.079.287.397
6	Kab. Aceh Tengah	1.251.781.285	3.879.121.000	315.800	192.984.100	25.334.900	-	-	-	2.095.400	-	5.351.632.485
7	Kab. Aceh Tenggara	69.092.800	1.502.532.879	-	100.000	62.050.000	-	-	-	-	-	1.633.775.679
8	Kab. Aceh Timur	1.428.405.316	3.648.007.000	-	18.385.400	25.422.076	-	-	-	-	-	5.121.351.843
9	Kab. Aceh Utara	3.219.391.973	3.946.457.588	-	90.648.000	19.635.000	-	11.426.510	-	36.943.800	-	7.324.502.871
10	Kab. Bireuen	1.983.130.217	3.088.363.165	-	150	5.173.651	-	121.605.612	-	-	-	5.198.272.795
11	Kab. Pidie	1.400.051.721	3.366.866.740	-	37.659.921	14.505.000	-	-	-	-	-	4.819.270.862
12	Kab. Simeulue	292.668.931	2.369.323.623	-	26.648.131	11.833.586	-	-	-	-	-	2.724.231.016
13	Kota Banda Aceh	841.140.794	1.259.697.667	-	4.120.000	52.202.500	122.004.000	55.725.500	-	1.450.000	-	3.144.446.106
14	Kota Sabang	207.170.211	1.631.047.000	-	26.725.380	-	-	216.404.676	-	81.472.965	-	2.204.408.529
15	Kota Langsa	295.247.390	455.202.506	25.338	7.832.420	1.158.600	-	103.095.705	-	1.330.000	-	863.891.959
16	Kota Lhokseumawe	608.567.772	776.953.260	-	67.723.000	14.424.400	-	87.724.650	-	18.097.800	-	1.573.490.882
17	Kab. Gayo Lues	38.647.222	1.832.195.474	-	53.304.720	30.952.000	-	-	-	-	-	1.955.099.416
18	Kab. Aceh Barat Daya	425.151.839	1.796.052.810	-	118.162.500	40.212.750	-	-	-	-	-	2.397.868.078
19	Kab. Aceh Jaya	341.773.000	3.215.732.291	-	3.020.400	57.560.300	-	-	-	-	-	4.055.562.899
20	Kab. Nagan Raya	843.769.169	1.970.023.243	-	109.491.480	2.532.998	-	-	-	-	-	3.043.051.596
21	Kab. Aceh Tamiang	683.883.514	2.880.173.421	-	12.395.000	8.037.438	-	-	-	61.171.030	-	3.645.666.411
22	Kab. Bener Meriah	20.531.519	3.429.806.000	-	2.500.600	3.200.000	-	28.390.000	-	-	-	3.484.428.119
23	Kab. Pidie Jaya	926.144.050	3.204.747.332	-	10.494.973	16.305.000	-	-	-	52.402.650	-	4.210.094.005
24	Kota Subulussalam	951.906.150	1.737.999.860	-	169.338.100	112.250.000	-	-	-	-	-	2.971.494.110
25	Provinsi Sumatera Utara	-	924.999.738	73.756.135	111.131.600	-	-	185.175.277	-	99.330.577	-	1.627.048.715
26	Kab. Asahan	129.470.155	4.838.132.500	-	121.283.200	7.759.750	-	-	-	-	-	5.096.707.880
27	Kab. Dairi	1.820.125.545	2.398.299.850	-	150.000	650.000	17.935.000	-	588.044.000	80.400.000	-	4.905.604.395
28	Kab. Deli Serdang	4.945.924.029	3.358.677.180	18.677.900	142.058.528	9.083.450	-	209.954.921	-	1.720.000	-	8.781.927.238
29	Kab. Karo	1.927.757.643	5.860.709.000	-	59.824.300	57.485.117	43.215.200	200.347.280	571.183.937	4.687.268	-	8.725.209.745
30	Kab. Labuhanbatu	1.468.535.481	3.088.826.500	-	193.000.000	-	-	181.762.300	-	-	-	4.932.124.281
31	Kab. Langkat	2.097.454.346	5.638.067.500	31.381.700	43.286.000	-	-	-	-	-	-	7.940.433.496
32	Kab. Mandailing Natal	1.058.927.750	2.856.602.201	-	119.865.950	9.133.700	-	289.177.833	-	18.000.000	-	4.366.237.559
33	Kab. Nias	828.210.357	2.444.146.000	-	25.715.357	-	-	-	-	71.280.100	-	3.428.649.099
34	Kab. Simalungun	3.897.748.494	6.196.095.500	-	100.618.000	80.623.624	197.166.100	-	346.932.741	11.701.800	-	10.830.886.259
35	Kab. Tapanuli Selatan	461.356.116	2.349.940.000	-	153.825.000	5.418.300	-	55.190.000	-	-	-	3.207.321.763
36	Kab. Tapanuli Tengah	1.567.801.531	727.068.406	-	167.550.210	60.004.050	-	-	-	11.727.030	-	2.747.036.224
37	Kab. Tapanuli Utara	18.294.000	212.686.339	-	136.794.354	-	1.500.000	-	75.580.000	-	-	444.854.693
38	Kab. Toba Samosir	1.589.924.029	1.348.488.969	-	250.400.000	86.815.972	26.013.514	-	-	61.532.660	-	3.603.118.394
39	Kota Binjai	800.704.338	1.848.939.000	-	86.273.347	-	-	187.500.000	-	16.688.776	-	3.046.593.810
40	Kota Medan	4.703.620.047	719.429.211	-	146.050.000	32.100.000	-	219.400.000	-	500.000	-	5.821.099.258
41	Kota Pematang Siantar	675.383.098	2.592.274.484	-	27.577.696	-	-	-	-	12.984.068	-	3.625.484.168
42	Kota Sibolga	139.156.934	2.581.787.000	-	134.144.250	-	-	-	-	6.317.000	-	3.359.633.969
43	Kota Tanjung Balai	379.766.194	1.696.100	-	43.361.500	-	-	77.498.000	-	50.870.000	-	695.371.794
44	Kota Tebing Tinggi	277.672.918	745.499.356	-	85.906.000	-	-	207.829.400	-	2.200	-	1.343.190.914
45	Kota Padang Sidempuan	831.805.147	1.121.824.848	-	39.599.250	-	-	-	-	38.184.000	-	2.037.167.510
46	Kab. Pakpak Bharat	223.455.759	1.377.712.000	-	4.360.050	-	152.749.564	-	396.037.970	9.017.500	-	2.178.132.843
47	Kab. Nias Selatan	1.720.179.440	2.638.690.999	-	-	30.728.990	31.689.664	-	-	2.192.612	-	4.423.481.705
48	Kab. Humbang Hasundutan	650.233.761	927.785.638	-	136.140.600	745.000	213.446.800	-	640.847.457	27.323.300	-	2.597.670.806
49	Kab. Serdang Bedagai	1.647.799.977	2.295.954.973	-	16.059.500	490.000	-	-	-	12.137.500	-	4.407.964.493
50	Kab. Samosir	791.242.300	2.734.066.640	-	20.849.650	-	11.389.000	-	356.314.294	34.908.000	-	3.963.503.542
51	Kab. Batu Bara	1.311.939.798	1.782.201.169	-	25.341.750	3.852.900	-	-	-	500.000	-	3.123.835.617

RINCIAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK LAINNYA
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAK Nonfisik										Total Penerimaan Bukan Pajak Lainnya
		Potongan SPM										
		Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dana Pelayanan Kepariwisataan	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	
(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14) = 5+6+7+8+9+10+11+12+13+14
52	Kab. Padang Lawas	1.339.071.131	914.426.525	-	128.500.000	-	-	-	-	-	-	2.381.997.656
53	Kab. Padang Lawas Utara	1.160.673.642	1.268.876.962	-	41.248.000	-	-	-	-	-	-	2.470.798.604
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	1.598.991.000	3.806.851.000	-	151.936.500	32.751.000	-	-	-	5.905.586	-	5.596.435.086
55	Kab. Labuhanbatu Utara	655.706.400	3.601.788.800	-	70.957.700	-	-	126.415.000	-	-	-	4.454.867.900
56	Kab. Nias Utara	408.052.650	2.590.039.500	-	21.120.800	2.575.839	-	-	-	86.351.148	-	3.172.634.837
57	Kab. Nias Barat	268.840.850	531.883.113	-	14.348.400	40.000	-	-	-	-	-	815.112.363
58	Kota Gunungsitoli	248.001.760	551.562.774	-	5.767.952	12.412.800	-	16.215.812	-	24.224.352	-	858.185.450
59	Provinsi Sumatera Barat	-	1.190.262.893	26.578.833	3.373.297	-	-	102.218.100	-	85.109.170	-	1.417.789.131
60	Kab. Lima Puluh Kota	1.307.837.244	2.624.811.367	-	37.512.500	9.169.990	-	71.474.100	-	26.894.300	-	4.161.480.401
61	Kab. Agam	2.968.293.679	5.660.114.015	10.184.417	110.652.195	3.839.983	60.931.230	493.106	-	50.338.680	-	8.867.800.805
62	Kab. Kepulauan Mentawai	1.257.182.500	3.847.709.500	-	116.875.200	-	27.110.000	-	-	41.828.029	-	6.293.104.749
63	Kab. Padang Pariaman	1.543.855.091	6.173.878.524	-	312.100	800.000	1.441.000	-	-	-	-	7.856.429.916
64	Kab. Pasaman	1.207.464.050	4.531.047.936	53.806.759	101.546.550	10.145.800	-	-	-	26.305.800	-	5.953.046.171
65	Kab. Pesisir Selatan	2.001.200.420	6.009.928.932	-	100.590.910	97.376.440	98.036.870	-	351.984.440	4.654.361	-	8.728.732.299
66	Kab. Sijunjung	988.046.733	133.667	-	60.146.991	74.184.695	85.133.000	299.000.000	-	7.760.365	-	1.514.405.451
67	Kab. Solok	1.012.664.176	4.336.726.911	-	27.855.650	34.850.000	-	27.473.452	-	1.514.900	-	5.474.008.705
68	Kab. Tanah Datar	1.153.304.850	5.161.984.000	-	66.364.900	216.183.340	17.184.900	-	-	26.311.850	-	6.866.215.644
69	Kota Bukit Tinggi	494.728.865	1.938.662.886	64.049.510	102.963.160	-	-	67.856.029	-	29.679.130	-	2.912.999.505
70	Kota Padang Panjang	311.020.482	675.493.429	-	34.839.450	13.212.750	-	-	-	51.247.255	-	1.138.840.259
71	Kota Padang	2.894.570.331	2.791.894.546	-	22.995.850	8.110.400	-	22.740.100	-	30.415.630	-	6.230.237.373
72	Kota Payakumbuh	610.806.205	951.856.122	-	13.401.012	8.838.300	-	-	-	14.032.330	-	1.851.325.299
73	Kota Sawahlunto	114.939.786	753.399.501	184.254.266	154.438.600	20.000	165.347.950	279.014.767	279.241.758	70.198.734	-	2.006.016.594
74	Kota Solok	286.624.006	727.025.000	-	125.650.500	33.065.900	-	-	-	30.963.800	-	1.615.116.711
75	Kota Pariaman	338.354.500	483.602.878	-	16.780.000	583.000	-	131.054.500	-	19.477.600	-	1.019.761.318
76	Kab. Pasaman Barat	2.121.367.500	5.943.052.000	-	33.279.100	72.621.536	-	-	-	3.995.650	-	8.339.008.470
77	Kab. Dharmasraya	452.780.450	1.439.764.007	-	218.000	2.540.000	-	131.202.508	-	16.690.600	-	2.043.333.034
78	Kab. Solok Selatan	1.017.989.550	1.902.653.719	-	23.953.403	29.260.000	-	-	-	47.363.750	-	3.021.220.422
79	Provinsi Riau	-	223.438.823	243.382.100	9.714.039	-	-	20.243.670	-	279.283.979	-	811.919.444
80	Kab. Bengkalis	2.105.885.896	1.682.792.964	-	109.366.158	126.730.000	-	124.071.600	-	43.178.700	-	4.225.083.481
81	Kab. Indragiri Hilir	3.159.318.000	4.810.499.000	-	34.114.929	9.141.875	-	-	-	-	-	8.258.116.207
82	Kab. Indragiri Hulu	1.820.189.345	3.340.149.500	-	8.501.000	26.519.600	-	106.999.620	-	-	-	5.472.319.665
83	Kab. Kampar	3.478.389.931	5.410.012.000	-	62.334.000	10.500.000	-	3.001.824	-	2.117.020	-	9.115.201.776
84	Kab. Kuantan Singingi	406.103.016	3.905.879.500	-	81.555.000	99.886.949	-	-	-	60.538.000	-	5.337.540.376
85	Kab. Pelalawan	1.715.258.955	2.435.191.000	-	144.186.650	1.507.500	-	214.606.600	-	-	-	4.884.831.855
86	Kab. Rokan Hilir	2.765.814.084	3.370.705.000	-	15.521.000	73.000	-	-	-	45.336.230	-	6.319.569.880
87	Kab. Rokan Hulu	1.757.463.386	3.677.833.500	-	88.687.500	52.245.600	-	160.382.000	-	-	-	5.865.722.589
88	Kab. Siak	2.530.578.500	2.399.991.500	145.375.000	109.722.872	40.770.000	172.025.000	94.014.700	-	105.791.000	-	5.646.947.739
89	Kota Dumai	466.460.797	1.554.848.509	-	148.745.910	10.070.250	-	73.639.210	-	-	-	2.711.716.041
90	Kota Pekanbaru	2.772.404.000	2.079.695.483	-	161.700.000	15.046.000	-	299.000.000	-	14.557.330	-	5.343.345.651
91	Kab. Kepulauan Meranti	922.992.527	1.792.046.500	-	-	-	-	281.831.500	-	-	-	3.106.191.115
92	Provinsi Jambi	-	480.825.030	72.830.400	95.093.806	-	-	97.589.161	-	126.065.078	-	872.483.627
93	Kab. Batanghari	564.088.741	2.597.680.000	-	6.510.000	44.345.610	-	158.431.569	-	-	-	3.371.251.047
94	Kab. Bungo	2.009.018.042	4.667.805.092	-	784.700	84.111.519	-	-	-	1.270.000	-	6.762.992.753
95	Kab. Kerinci	941.186.215	2.204.481.055	-	1.833	54.690.200	1.046.000	-	-	-	-	3.201.405.303
96	Kab. Merangin	975.313.656	6.222.473.500	-	17.730.000	1.940.906	1.125.000	-	-	-	-	7.219.383.884
97	Kab. Muaro Jambi	1.435.310.003	3.123.747.635	-	57.690.300	37.929.000	3.300.000	-	-	-	-	4.788.024.146
98	Kab. Sarolangun	1.586.519.957	4.278.443.974	-	2.934.601	534.000	-	-	-	-	-	5.883.432.532
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	1.042.491.663	1.589.323.885	-	99.344.400	24.786.647	-	-	-	28.130.180	-	2.784.077.904
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	448.462.194	3.800.556.000	-	7.245.000	215.872.000	-	-	-	-	-	4.650.401.370
101	Kab. Tebo	1.296.650.414	2.687.941.610	-	56.211.250	2.404.000	-	-	-	-	-	4.043.207.274
102	Kota Jambi	1.943.362.274	3.456.137.500	-	28.789.995	686.600	-	-	-	195.509	-	5.629.635.534
103	Kota Sungai Penuh	190.888.224	1.087.702.201	-	140.672.750	4.790.294	-	-	-	14.870.594	-	1.440.187.829
104	Provinsi Sumatera Selatan	-	930.668.060	552.675.248	191.011.412	-	-	79.519.751	-	355.611.845	-	2.231.704.399

RINCIAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK LAINNYA
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAK Nonfisik										Total Penerimaan Bukan Pajak Lainnya
		Potongan SPM										
		Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dana Pelayanan Kepariwisataan	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	
(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14) = 5+6+7+8+9+10+11+12+13+14
105	Kab. Lahat	2.772.215.100	3.294.617.000	-	61.354.150	63.500.000	-	206.860.847	-	1.000	-	6.421.601.953
106	Kab. Musi Banyuasin	1.881.677.469	4.554.989.000	-	102.225.760	5.775.490	-	-	-	3.286.690	-	6.552.339.509
107	Kab. Musi Rawas	1.323.134.825	3.149.948.195	-	142.495.626	17.260.000	-	130.872.600	-	-	-	4.790.422.195
108	Kab. Muara Enim	2.791.586.300	4.258.429.000	-	115.501.850	53.315.250	-	-	-	51.026.306	-	7.289.383.886
109	Kab. Ogan Komering Ilir	3.753.614.950	1.443.377.124	-	44.640.000	30.000.000	-	219.400.000	-	-	-	5.491.032.208
110	Kab. Ogan Komering Ulu	402.329.800	3.024.119.064	-	150.201.000	3.098.500	-	150.692.000	-	-	-	3.734.655.123
111	Kota Palembang	1.862.461.825	3.249.448.417	26.595.681	4.859.000	-	-	-	-	8.496.160	-	5.437.143.182
112	Kota Prabumulih	922.767.288	1.501.627.914	-	64.766.000	-	-	-	-	24.721.400	-	2.522.576.177
113	Kota Pagar Alam	173.260.200	457.785.435	-	90.858.800	-	48.088.000	311.521.500	-	-	-	1.081.596.966
114	Kota Lubuk Linggau	1.068.100.520	2.540.600.922	-	46.309.250	39.123.300	-	219.400.000	-	7.736.000	-	3.921.941.333
115	Kab. Banyuasin	1.968.144.268	3.621.205.322	-	111.967.500	13.942.900	-	-	-	-	-	5.717.192.914
116	Kab. Ogan Ilir	1.159.329.848	2.717.193.727	-	187.800.000	81.226.000	-	-	-	-	-	4.168.370.493
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	2.238.242.331	4.083.871.500	-	140.800.000	13.000.000	-	-	-	47.140.000	-	6.643.322.593
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	322.098.000	2.254.104.000	-	140.737.000	10.945.200	-	-	-	-	-	2.728.109.457
119	Kab. Empat Lawang	910.793.000	2.381.566.929	-	23.460.200	57.500.000	-	-	-	-	-	3.392.046.916
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	245.594.550	846.056.500	-	108.279.300	-	-	-	-	-	-	1.209.381.078
121	Kab. Musi Rawas Utara	1.090.778.020	984.420.849	-	137.870.773	-	-	-	-	-	-	2.377.601.313
122	Provinsi Bengkulu	-	204.876.299	216.753.192	24.485.000	-	-	142.685.000	-	9.925.000	-	598.724.491
123	Kab. Bengkulu Selatan	1.026.691.094	2.419.122.180	-	119.623.850	9.800.000	-	-	-	126.550	-	3.575.363.674
124	Kab. Bengkulu Utara	1.634.399.563	4.766.463.293	-	22.676.800	8.100.000	-	-	-	-	-	6.431.639.656
125	Kab. Rejang Lebong	1.343.959.847	3.402.146.878	-	35.355.000	8.210.000	338.749.500	-	-	9.285.000	-	5.277.774.600
126	Kota Bengkulu	1.473.459.950	3.095.756.000	-	142.687.000	-	-	299.000.000	-	1.500.000	-	5.012.402.950
127	Kab. Kaur	767.272.600	2.781.192.000	-	112.634.200	64.691.236	-	-	-	-	-	3.757.990.036
128	Kab. Seluma	391.603.000	1.390.583.324	-	142.332.000	30.596.000	-	220.689.000	-	-	-	2.180.811.862
129	Kab. Mukomuko	1.880.922.000	3.324.740.490	-	218.059.250	57.000.000	-	-	-	45.802.500	-	5.526.524.240
130	Kab. Lebong	1.082.175.900	1.888.354.200	-	260	23.050.000	-	-	-	-	-	2.993.580.360
131	Kab. Kepahiang	321.617.973	3.159.836.000	-	280.000	-	-	-	-	-	-	3.778.740.473
132	Kab. Bengkulu Tengah	699.621.300	2.882.688.010	-	110.949.000	21.000.000	-	-	-	-	-	3.714.258.310
133	Provinsi Lampung	-	310.395.300	29.062.600	11.835.000	-	-	-	-	15.576.600	-	369.666.570
134	Kab. Lampung Barat	133.349.696	2.503.439.544	-	29.042.000	124.380.600	13.307.000	209.594.900	-	2.887.347	-	3.016.001.273
135	Kab. Lampung Selatan	2.000.936.300	1.826.919.931	-	22.344.200	26.653.330	-	255.000	-	-	-	3.892.946.995
136	Kab. Lampung Tengah	4.877.042.000	6.012.418.000	-	100.623.300	1.978.312	-	219.400.000	-	4.114.500	-	11.221.379.198
137	Kab. Lampung Utara	3.276.509.500	36.553.150	-	83.456.000	230.000	-	114.834.000	-	2.115.500	-	3.532.162.350
138	Kab. Lampung Timur	4.570.045.401	4.309.642.480	-	24.426.200	-	-	145.255.000	-	20.950.000	-	9.070.343.629
139	Kab. Tanggamus	3.817.572.960	4.421.078.000	-	199.000	14.900.000	-	219.400.000	-	29.256.000	-	8.503.765.040
140	Kab. Tulang Bawang	500	19.999.100	-	149.831.500	50.864.000	-	76.020.000	-	-	-	336.495.900
141	Kab. Way Kanan	2.315.253.579	2.971.148.098	-	28.923.600	7.200.000	-	309.914.800	-	489.950	-	5.758.713.717
142	Kota Bandar Lampung	2.881.902.800	1.903.470.685	-	151.300.000	10.650.000	-	35.085.000	-	20.812.000	-	5.930.499.383
143	Kota Metro	1.108.389.677	1.160.077.897	-	58.459.400	52.037.250	-	331.980.500	-	9.575.400	-	2.720.525.349
144	Kab. Pesawaran	511.930.602	779.469.168	-	108.025.000	27.756.000	24.135.000	257.827.148	-	8.040.000	-	1.761.374.450
145	Kab. Pringsewu	2.096.694.746	1.128.533.747	-	52.245.720	65.463.324	-	171.923.625	-	10.478.420	-	3.525.339.998
146	Kab. Mesuji	526.411.920	4.089.413.500	-	155.580.480	53.039.200	-	168.049.750	-	-	-	4.992.494.850
147	Kab. Tulang Bawang Barat	104.915.000	3.710.262.500	-	-	8.255.000	-	67.058.800	-	-	-	3.892.931.750
148	Kab. Pesisir Barat	619.625.550	1.567.260.285	-	45.400.000	47.967.500	-	206.758.400	-	30.461.000	-	2.683.038.734
149	Provinsi DKI Jakarta	4.760.082.000	-	91.828.872	95.662.660	-	-	15.871.040	-	254.863.541	-	5.218.308.113
150	Provinsi Jawa Barat	-	2.182.422.583	11.369.064	8.610.523	-	-	9.038.833	-	99.870.000	-	2.330.116.358
151	Kab. Bandung	291.171.627	12.145.346.000	-	46.700.000	83.120	24.555.000	187.500.000	62.343.100	78.000	-	12.757.776.847
152	Kab. Bekasi	7.973.927.014	383.327.855	-	113.142.600	67.524.950	-	187.500.000	-	-	-	8.725.422.419
153	Kab. Bogor	7.258.776.479	18.202.774.500	-	14.276.250	20.781.590	-	23.819.155	-	13.187.253	-	25.565.207.907
154	Kab. Ciamis	1.301.463.060	6.193.189.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7.494.652.060
155	Kab. Cianjur	4.771.584.095	2.288.232.210	-	-	308.248	1.500.000	-	-	29.880.000	-	7.091.510.853
156	Kab. Cirebon	2.553.796.470	9.458.047.000	-	57.405.000	3.000.000	-	91.284.775	-	-	-	12.169.922.072
157	Kab. Garut	373.791.343	10.827.865.026	-	90.378.900	7.666.748	-	660.249	-	6.844.900	-	11.307.306.369

RINCIAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK LAINNYA
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAK Nonfisik										Total Penerimaan Bukan Pajak Lainnya
		Potongan SPM										
		Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dana Pelayanan Kepariwisataan	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	
(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14) = 5+6+7+8+9+10+11+12+13+14
158	Kab. Indramayu	-	8.013.280.000	-	-	1.386.000	-	-	-	-	-	8.080.292.147
159	Kab. Karawang	6.338.956.614	9.298.087.500	-	27.460.000	3.700	-	-	-	-	-	16.171.014.614
160	Kab. Kuningan	2.202.208.945	5.743.771.076	-	-	38.770.000	-	-	-	-	-	8.438.540.521
161	Kab. Majalengka	502.048.835	2.755.089.660	-	25.900.000	52.503.040	-	-	-	-	-	3.337.029.079
162	Kab. Purwakarta	694.140.160	3.054.142.458	-	41.756.900	4.760.000	-	-	-	2.450.000	-	3.831.275.589
163	Kab. Subang	1.028.446.686	7.444.530.500	1.522.400	10.403.000	6.580.000	-	-	-	-	-	9.017.409.346
164	Kab. Sukabumi	2.876.563.045	10.345.889.500	972.400	16.063.900	31.308.880	700.000	-	504.385.025	111.305.000	-	13.912.898.802
165	Kab. Sumedang	458.830.400	4.063.281.770	-	70.828.690	862.750	-	-	-	14.100.000	-	4.973.859.010
166	Kab. Tasikmalaya	6.811.153.004	5.025.732.356	-	142.270.500	3.619.155	2.523.507	87.441.000	-	509.500	-	12.073.249.022
167	Kota Bandung	4.271.690.200	8.293.431.000	-	60.256.350	6.375.000	-	-	-	8.506.375	-	13.514.778.813
168	Kota Bekasi	4.337.058.392	6.163.426.681	-	1.674.000	70.750.000	-	-	-	3.810.000	-	10.583.821.380
169	Kota Bogor	3.180.521.581	2.284.305.791	-	75.276.400	-	-	-	-	5.045.460	-	5.718.354.711
170	Kota Cirebon	1.664.597.988	2.005.213.850	-	19.350.250	7.500.000	-	-	-	26.026.800	-	3.722.688.888
171	Kota Depok	2.511.253.298	3.131.952.453	-	156.276.000	2.201.100	-	24.446.050	-	-	-	6.312.151.640
172	Kota Sukabumi	673.230.400	1.873.224.000	-	24.310.000	-	-	164.540.500	-	4.908.500	-	2.814.801.433
173	Kota Tasikmalaya	1.505.302.564	1.180.337.308	-	2.790.000	7.275.000	-	-	-	2.068.657	-	2.697.773.529
174	Kota Cimahi	1.852.761.843	2.894.123.000	-	56.306.724	9.995.500	-	-	-	84.530.000	-	4.904.022.567
175	Kota Banjar	237.090.960	1.722.197.170	-	48.217.700	3.649.000	-	-	-	-	-	2.011.154.830
176	Kab. Bandung Barat	-	6.689.574.000	-	16.055.000	61.600	-	-	-	7.600	-	6.819.250.726
177	Kab. Pangandaran	462.530.754	2.255.295.000	-	37.846.000	5.170.400	-	-	-	1.302.000	-	2.762.144.154
178	Provinsi Jawa Tengah	-	208.939.760	50.094.104	13.016.960	-	-	128.519.808	-	4.666.596	-	405.824.728
179	Kab. Banjarnegara	941.064.084	5.219.190.000	-	79.763.200	40.026.000	775.000	-	-	-	-	6.280.818.284
180	Kab. Banyumas	6.106.898.794	7.649.335.000	37.083.650	32.348.000	250.000	-	95.611.885	-	25.725.350	-	13.947.252.679
181	Kab. Batang	1.053.152.790	3.584.394.000	-	23.150.900	126.000	-	-	-	1.718.650	-	4.662.542.340
182	Kab. Blora	535.431.990	2.841.274.783	-	23.585.000	1.058.559	-	-	-	30.937.500	-	3.471.735.927
183	Kab. Boyolali	1.367.450.290	4.064.081.276	160.534.000	144.068.012	51.385.966	1.105.700	-	269.434.318	21.509.102	-	6.100.737.912
184	Kab. Brebes	1.618.360.121	3.195.359.213	-	4.991.087	186.303	-	-	-	-	-	4.915.019.296
185	Kab. Cilacap	4.363.449.839	2.099.018.806	-	151.300.000	58.791.700	-	-	-	54.100	-	6.779.132.177
186	Kab. Demak	2.836.484.487	1.389.367.090	145.613.000	16.325.000	2.760.000	-	-	-	10.131.350	-	4.474.533.322
187	Kab. Grobogan	2.874.846.029	3.458.378.963	14.315.950	92.319.500	119.482.200	-	-	-	5.700.000	-	6.739.092.559
188	Kab. Jepara	3.542.116.156	5.135.496.000	4.159.000	15.239.570	9.629.390	47.114.684	-	-	17.469.405	-	8.857.284.357
189	Kab. Karanganyar	1.386.559.231	1.165.132.451	-	4.921.000	4.978.722	-	-	-	5.373.850	-	2.886.673.486
190	Kab. Kebumen	2.933.765.976	1.788.738.238	-	13.453.841	12.023.440	-	-	-	17.899.423	-	4.765.880.918
191	Kab. Kendal	2.262.305.618	4.011.567.574	-	18.686.750	807.340	-	-	-	1.534.100	-	6.341.756.152
192	Kab. Klaten	5.162.214.865	5.584.216.000	-	120.046.500	99.898.336	15.181.350	-	337.723.500	110.178.900	-	11.514.334.986
193	Kab. Kudus	1.779.517.431	3.957.526.000	10.769.850	109.367.800	6.300.000	-	-	-	34.081.900	-	6.242.075.166
194	Kab. Magelang	3.598.694.995	5.107.855.500	-	61.616.010	58.904.660	4.762.130	-	672.162.790	31.234.320	-	9.790.598.122
195	Kab. Pati	1.040.596.481	3.540.213.338	-	1.932.500	2.747.500	-	-	-	25.760.166	-	4.612.849.749
196	Kab. Pekalongan	2.344.375.139	4.686.389.500	-	51.877.800	-	-	-	-	6.400.000	-	7.089.042.439
197	Kab. Pemalang	713.921.300	5.630.016.500	-	3.595.000	5.775.515	-	-	-	-	-	6.355.656.072
198	Kab. Purbalingga	480.337.320	5.120.181.000	44.810.000	18.139.600	-	-	-	-	33.521.400	-	5.696.989.320
199	Kab. Purworejo	1.236.256.695	4.542.209.000	332.710	15.380.592	-	59.393.900	-	78.075.000	2.708.400	-	5.934.356.297
200	Kab. Rembang	1.022.088.512	2.415.019.585	5.458.708	49.657.777	38.000	-	-	-	420.000	-	3.533.867.934
201	Kab. Semarang	1.610.829.180	4.313.634.712	-	14.182.000	49.860.750	40.793.965	-	103.300.250	3.889.800	-	6.419.105.678
202	Kab. Sragen	1.077.564.250	3.117.341.143	-	15.403.000	9.987.580	10.227.550	-	211.098.200	34.000	-	4.647.845.093
203	Kab. Sukoharjo	1.906.897.156	1.768.018.923	-	61.726.000	200	-	-	-	-	-	3.920.967.049
204	Kab. Tegal	2.704.302.372	7.031.433.500	-	28.762.733	8.750.500	-	-	-	3.181.000	-	10.170.973.298
205	Kab. Temanggung	3.556.122.744	4.129.102.329	-	58.386.915	4.572.050	-	-	-	23.878.526	-	8.250.894.979
206	Kab. Wonogiri	496.207.025	3.214.937.757	18.772.950	938.140	10.250	70.342.915	-	42.133.604	1.100	-	3.843.377.125
207	Kab. Wonosobo	647.331.336	4.220.257.138	-	34.917.500	11.250.000	23.205.761	-	-	11.372.737	-	5.090.745.147
208	Kota Magelang	273.681.657	868.932.851	-	46.484.808	81.037.500	-	193.548.556	-	6.089.785	-	1.686.456.096
209	Kota Pekalongan	329.308.425	1.653.343.707	23.821.304	1.500.500	-	-	-	-	46.962.444	-	2.054.936.380
210	Kota Salatiga	516.400.046	1.217.449.500	-	25.910.900	2.465.500	59.071.800	-	-	1.670.000	-	1.934.080.706

RINCIAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK LAINNYA
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAK Nonfisik										Total Penerimaan Bukan Pajak Lainnya
		Potongan SPM										
		Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dana Pelayanan Kepariwisataan	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	
(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14) = 5+6+7+8+9+10+11+12+13+14
211	Kota Semarang	4.005.020.855	442.618.286	-	60.130.642	7.043.487	47.478.000	-	52.548.000	36.724.075	-	4.929.346.627
212	Kota Surakarta	1.601.460.277	1.837.191.574	570.302.171	38.736.137	-	97.839.450	259.721.445	-	26.683.225	-	4.499.452.142
213	Kota Tegal	310.599.078	749.925.723	-	24.500.500	14.490.000	-	178.736.167	-	9.520.000	-	1.295.771.468
214	Provinsi DI Yogyakarta	-	224.503.969	-	38.431.000	-	-	828.750	-	128.734.523	-	492.657.050
215	Kab. Bantul	1.055.943.928	2.755.275.663	-	33.307.570	12.612.500	-	72.821.500	-	2.687.760	-	3.996.968.144
216	Kab. Gunung Kidul	217.341.834	4.101.917.000	-	28.574.250	55.766.410	1.300.000	173.194.037	-	471.000	-	4.660.789.341
217	Kab. Kulon Progo	796.502.110	3.800.136.036	-	82.836	69.867.116	7.080.400	-	64.263.022	4.963.879	-	5.077.657.495
218	Kab. Sleman	3.560.324.755	3.034.572.763	-	1.757.174	17.724.543	-	153.902.375	-	3.417.540	-	6.907.896.615
219	Kota Yogyakarta	110.469.252	868.210.906	-	22.377.200	-	-	77.190.688	-	12.596.570	-	1.963.512.375
220	Provinsi Jawa Timur	-	327.192.723	16.007.005	2.580.900	-	-	34.176.700	-	10.885.618	-	1.156.948.763
221	Kab. Bangkalan	2.354.411.030	3.449.644.592	8.773.156	105.145.000	115.544.900	-	-	-	14.380.100	-	7.140.159.574
222	Kab. Banyuwangi	3.519.567.117	6.360.165.000	23.170.500	106.047.600	84.842.100	165.690.000	-	-	3.621.200	-	10.263.103.517
223	Kab. Blitar	3.589.905.017	2.851.022.219	164.978.611	143.483.705	92.428.357	-	-	-	12.294.000	-	7.079.487.517
224	Kab. Bojonegoro	2.815.218.611	5.363.103.500	-	91.741.200	114.227.000	-	-	-	-	-	8.412.350.681
225	Kab. Bondowoso	1.657.229.969	3.616.317.000	-	14.741.900	26.460.922	88.887.000	-	53.163.322	5.949.400	-	5.462.749.513
226	Kab. Gresik	3.766.966.938	6.285.309.000	12.401.552	2.678.832	1.378.000	-	-	-	33.418.100	-	10.530.426.447
227	Kab. Jember	4.124.921.076	8.541.301.500	-	47.775.431	142.243.900	-	172.249.000	-	96.817.040	-	13.844.922.962
228	Kab. Jombang	1.082.779.392	5.976.960.000	-	23.126.000	102.907.050	-	-	-	-	-	7.837.953.066
229	Kab. Kediri	2.077.167.558	6.027.474.000	-	6.581.386	960.000	-	-	-	7.480.000	-	8.422.428.192
230	Kab. Lamongan	2.375.843.800	5.679.952.373	16.767.780	69.287.600	29.815.700	-	-	-	643.350	-	8.452.179.275
231	Kab. Lumajang	2.573.486.065	4.987.004.651	17.363.812	48.739.720	68.584.855	12.894.824	-	493.823.460	8.969.000	-	8.238.801.757
232	Kab. Madiun	1.479.920.948	3.264.115.000	-	46.144.225	31.031.918	-	-	-	14.104.948	-	5.076.366.536
233	Kab. Magetan	1.329.872.504	3.413.537.000	-	30.821.065	32.122.000	-	-	-	18.592.800	-	5.059.206.562
234	Kab. Malang	2.266.021.239	4.400.125.050	12.244.056	1.413.500	6.501.623	-	53.661.600	-	655.000	-	6.767.639.140
235	Kab. Mojokerto	2.161.815.054	4.498.601.500	-	31.531.275	3.962.600	-	-	-	20.319.609	-	6.728.352.635
236	Kab. Nganjuk	1.072.206.241	3.757.281.500	2.797.030	155.929.566	30.649.754	-	-	-	9.330.000	-	5.028.194.091
237	Kab. Ngawi	320.068.682	2.140.363.536	11.628.500	14.953.500	9.498.950	-	219.400.000	-	3.211.400	-	2.799.325.273
238	Kab. Pacitan	726.455.622	4.121.155.000	-	8.539.500	53.364.652	183.494.404	-	-	1.059.425	-	5.094.493.273
239	Kab. Pamekasan	2.106.976.567	3.742.325.465	21.113.000	65.778.000	129.172.000	-	86.417.000	-	150.500	-	6.243.374.532
240	Kab. Pasuruan	3.473.480.868	6.389.575.500	-	42.747.182	17.686.000	23.287.000	-	437.163.187	66.398.250	-	10.473.254.033
241	Kab. Ponorogo	1.125.831.589	4.145.318.064	-	16.947.600	17.689.000	-	-	-	17.848.400	-	5.381.932.484
242	Kab. Probolinggo	3.132.022.724	5.014.151.500	-	107.444.528	208.536.600	140.623.100	-	-	12.559.000	-	8.615.337.452
243	Kab. Sampang	127.421.177	5.086.763.000	-	64.310.500	96.874.880	-	-	-	60.942.900	-	5.436.312.457
244	Kab. Sidoarjo	6.206.109.341	2.605.951.622	-	18.602.000	8.761.708	-	181.764.065	-	9.781.900	-	9.062.852.369
245	Kab. Situbondo	587.714.155	4.164.470.113	-	85.310.640	80.330.000	200.554.473	121.147.312	669.847.421	17.646.230	-	5.927.020.344
246	Kab. Sumenep	4.795.695.275	6.139.808.500	5.141.220	97.660.637	12.817.605	82.760.000	219.400.000	-	2.749.342	-	11.383.971.796
247	Kab. Trenggalek	1.881.689.407	3.800.852.000	-	37.975.000	8.743.060	-	-	-	30.999.770	-	5.982.769.432
248	Kab. Tuban	3.565.856.822	4.834.481.000	242.784.560	20.025.183	30.800.800	-	-	-	44.463.740	-	8.878.243.637
249	Kab. Tulungagung	3.382.034.310	4.503.866.000	3.051.450	114.230.900	2.426.700	-	-	-	16.854.400	-	8.078.424.105
250	Kota Blitar	700.956.499	508.406.528	-	80.254.490	-	-	-	-	4.938.900	-	1.747.559.104
251	Kota Kediri	897.717.540	2.042.385.000	108.051.970	84.233.000	-	-	-	-	-	-	3.705.189.024
252	Kota Madiun	646.771.314	-	-	18.581.550	-	-	-	-	38.751.050	-	969.603.680
253	Kota Malang	3.103.419.000	2.892.992.199	25.900.650	18.196.568	108.180.000	-	-	-	4.761.200	-	6.517.769.012
254	Kota Mojokerto	869.805.946	1.146.169.304	-	34.690.375	-	94.639.000	219.400.000	-	17.025.300	-	2.560.637.412
255	Kota Pasuruan	737.471.400	1.370.580.771	-	125.661.800	-	148.991.400	-	583.338.800	184.994.400	-	3.376.412.109
256	Kota Probolinggo	978.517.722	1.333.333.171	350.000.000	37.245.500	3.750.000	-	219.400.000	-	59.064.800	-	2.981.311.193
257	Kota Surabaya	8.216.771.300	7.579.543.829	126.654.242	121.148.800	65.000.000	-	-	-	-	148.405	16.194.168.033
258	Kota Batu	958.510.926	1.098.072.517	-	166.950.000	-	-	252.003.387	-	77.279.003	-	2.911.483.772
259	Provinsi Kalimantan Barat	-	2.131.071.047	90.742.519	80.384.300	-	-	89.482.700	-	137.191.134	-	2.562.689.618
260	Kab. Bengkayang	428.587.290	3.542.975.993	-	86.157.825	8.162.500	-	-	-	-	-	4.124.349.608
261	Kab. Landak	1.353.209.424	2.107.604.853	-	3.227.881	-	-	-	-	-	-	3.465.155.290
262	Kab. Kapuas Hulu	2.035.379.766	3.717.662.500	-	9.187.000	22.000.000	-	-	-	7.289.300	-	5.791.518.566
263	Kab. Ketapang	2.838.924.418	5.157.617.000	-	22.380.000	17.296.000	-	-	-	-	-	8.075.505.056

RINCIAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK LAINNYA
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAK Nonfisik										Total Penerimaan Bukan Pajak Lainnya
		Potongan SPM										
		Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dana Pelayanan Kepariwisataan	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	
(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14) = 5+6+7+8+9+10+11+12+13+14
264	Kab. Mempawah	871.929.000	3.986.577.500	-	107.878.800	-	-	-	-	-	-	5.054.899.958
265	Kab. Sambas	1.907.651.201	5.645.366.500	18.728.750	500.438	4.015.000	-	-	-	935.218	-	7.920.109.364
266	Kab. Sanggau	2.154.031.994	3.205.156.000	-	35.381.329	10.797.852	-	-	-	7.753.726	-	5.428.323.028
267	Kab. Sintang	1.067.227.200	3.494.822.000	73.133.500	7.188.000	20.032.735	-	-	-	-	-	4.735.634.435
268	Kota Pontianak	1.331.057.000	3.210.374.669	-	-	30.000	10.259.070	172.145.422	-	1.199.860	-	4.725.066.021
269	Kota Singkawang	722.145.162	1.431.364.515	-	76.384.000	160.440	-	-	-	23.838.250	-	2.636.468.189
270	Kab. Sekadau	712.860.308	4.440.013.500	-	35.990.300	16.939.000	-	-	-	15.570.160	-	5.221.373.268
271	Kab. Melawi	377.261.050	2.410.524.867	-	149.540.327	2.711.049	-	-	-	-	-	2.948.367.463
272	Kab. Kayong Utara	130.374.054	866.272.515	-	808.000	416.955	-	-	-	-	-	1.001.821.712
273	Kab. Kubu Raya	1.352.539.013	2.838.745.778	-	825.530	3.499.000	-	3.215.760	-	-	-	4.239.164.121
274	Provinsi Kalimantan Tengah	-	483.383.020	267.272.416	110.937.039	-	-	1.578.650	-	249.554.985	-	1.133.814.083
275	Kab. Barito Selatan	294.197.500	2.758.814.500	-	22.422.000	-	-	-	-	-	-	3.075.434.000
276	Kab. Barito Utara	559.066.984	3.689.149.000	-	91.086.500	6.364.100	-	219.400.000	-	-	-	4.567.433.258
277	Kab. Kapuas	625.256.730	4.692.472.150	-	145.031.500	16.502.000	-	187.500.000	-	-	-	5.672.207.915
278	Kab. Kotawaringin Barat	848.619.098	1.804.270.520	-	101.512.000	57.054.380	12.800.000	184.665.224	-	2.905.158	-	3.049.911.731
279	Kab. Kotawaringin Timur	1.941.251.236	3.477.962.500	5.747.685	32.526.000	5.541.000	-	-	-	13.240.000	-	5.577.575.671
280	Kota Palangkaraya	783.687.939	1.540.409.937	-	68.063.900	80.000	-	-	-	922.000	-	2.395.459.046
281	Kab. Katingan	1.069.708.850	3.378.219.819	-	34.829.576	74.750.000	-	219.400.000	-	68.603.000	-	4.848.729.140
282	Kab. Seruyan	676.233.840	1.322.664.043	-	26.295.268	17.818.200	-	-	-	-	-	2.052.689.924
283	Kab. Sukamara	643.872.200	1.479.395.500	-	240.000.000	-	-	-	-	82.595.300	-	2.448.701.188
284	Kab. Lamandau	677.877.145	3.315.294.373	-	40.143.440	-	-	224.825.289	-	32.387.400	-	4.329.208.447
285	Kab. Gunung Mas	894.845.740	3.957.118.000	-	42.452.720	652.200	-	-	-	29.829.200	-	5.018.353.644
286	Kab. Pulang Pisau	442.858.000	2.391.479.378	-	143.527.400	271.862.500	-	-	-	725.800	-	3.370.580.236
287	Kab. Murung Raya	304.680.559	2.499.209.000	-	4.748.942	3.058.118	-	-	-	-	-	2.847.939.439
288	Kab. Barito Timur	435.848.200	2.164.441.047	-	61.752.600	-	-	-	-	32.975.000	-	2.695.016.897
289	Provinsi Kalimantan Selatan	-	436.586.985	109.384.750	255.868.600	-	-	128.557.700	-	513.510.382	-	1.443.908.417
290	Kab. Banjar	204.293.517	4.497.374.500	-	105.097.000	16.837.700	-	-	-	-	-	4.887.113.942
291	Kab. Barito Kuala	87.260.580	4.824.737.000	-	224.350.000	2.770.700	-	161.899.344	-	4.800.290	-	5.305.856.004
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	344.161.666	2.686.558.500	6.332.500	18.127.322	-	-	182.040.610	-	20.762.704	-	3.257.983.302
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	1.763.295.444	5.052.733.000	-	226.473.000	34.468.400	-	-	-	31.084.500	-	7.108.054.344
294	Kab. Hulu Sungai Utara	315.459.057	1.251.393.420	-	124.774.739	51.750.000	-	219.400.000	-	-	-	2.083.611.659
295	Kab. Kotabaru	2.411.138.276	4.099.048.000	-	22.979.000	7.500	-	-	-	2.440.000	-	6.610.672.006
296	Kab. Tabalong	788.889.971	2.820.344.000	-	112.810.400	5.431.855	-	200.249.348	-	-	-	4.007.440.987
297	Kab. Tanah Laut	1.422.300.892	2.709.523.000	-	86.795.127	17.686.584	-	-	-	72.620.750	-	4.632.381.722
298	Kab. Tapin	523.105.010	2.826.918.000	-	212.817.649	12.300.000	-	219.400.000	-	-	-	3.914.151.051
299	Kota Banjarbaru	821.213.756	1.162.281.869	-	122.811.504	-	-	-	-	90.707.000	-	2.505.619.129
300	Kota Banjarmasin	1.923.057.951	3.885.606.000	-	56.362.200	6.968.000	70.382.200	-	-	83.600	-	6.117.215.617
301	Kab. Balangan	594.309.893	2.111.530.500	-	174.745.800	-	-	-	-	-	-	2.911.563.743
302	Kab. Tanah Bumbu	509.115.108	2.258.015.624	-	59.709.856	28.700.000	-	-	-	-	-	2.872.121.837
303	Provinsi Kalimantan Timur	-	3.147.602.500	86.521.158	47.394.084	-	-	-	-	97.162.940	-	3.382.980.401
304	Kab. Berau	887.935.725	2.649.565.000	-	203.450.000	54.253.400	122.570.136	-	-	127.967.400	-	4.884.931.140
305	Kab. Kutai Kartanegara	2.351.559.416	4.110.414.500	-	26.833.071	10.170.000	12.903.900	42.605.370	-	-	-	6.554.486.257
306	Kab. Kutai Barat	277.250.313	1.568.501.500	-	116.877.200	-	-	-	-	-	-	2.457.884.427
307	Kab. Kutai Timur	962.904.040	2.894.127.500	-	30.690.938	48.678.000	-	-	-	-	-	3.936.400.478
308	Kab. Paser	1.363.728.908	1.842.499.000	150.973.640	112.898.585	327.900	-	240.959.350	-	606.410	-	3.711.993.793
309	Kota Balikpapan	2.040.969.000	4.182.740.000	-	148.458.300	34.264.225	-	194.334.960	-	-	-	7.539.220.913
310	Kota Bontang	579.459.626	2.432.260.494	-	26.960.601	43.357.478	-	220.837.920	-	2.704.508	-	3.331.570.426
311	Kota Samarinda	1.199.121.867	3.519.980.016	-	28.580.000	19.475.000	-	-	-	20.744.100	-	4.982.360.850
312	Kab. Penajam Paser Utara	177.010.985	1.912.082.000	-	115.774.200	22.214.300	-	-	-	-	-	2.227.081.485
313	Kab. Mahakam Ulu	235.489.500	12	-	219.100.000	-	-	-	-	-	-	493.124.091
314	Provinsi Sulawesi Utara	-	141.427.676	10.039.900	12.276.750	-	-	10.389.000	-	272.585.180	-	608.463.660
315	Kab. Bolaang Mongondow	1.408.031.292	4.847.644.571	-	288.650	71.400.000	-	-	-	-	-	6.351.485.766
316	Kab. Minahasa	296.552.068	5.083.060.500	-	6.384.827	29.361.404	-	-	-	-	-	5.667.915.894

RINCIAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK LAINNYA
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAK Nonfisik										Total Penerimaan Bukan Pajak Lainnya
		Potongan SPM										
		Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dana Pelayanan Kepariwisataan	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	
(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14) = 5+6+7+8+9+10+11+12+13+14
317	Kab. Sangihe	571.778.800	2.718.437.500	-	477.250	8.043.000	-	-	-	-	-	3.383.705.258
318	Kota Bitung	976.784.699	954.675.359	-	12.793.000	4.590.000	6.759.000	-	-	6.003.000	-	2.472.105.251
319	Kota Manado	2.087.499.100	1.314.682.230	-	26.496.161	-	47.062.200	47.060.745	227.480.000	-	-	3.758.603.008
320	Kab. Kepulauan Talaud	719.166.405	14.779.083	-	150.013	13.538.700	-	-	-	-	-	766.449.750
321	Kab. Minahasa Selatan	111.719.700	2.827.429.793	-	67.037.400	2.973.300	290.028.000	-	-	-	-	3.340.226.877
322	Kota Tomohon	532.432.276	1.139.821.290	-	8.680.275	2.450.000	-	-	-	15.647.800	-	1.803.906.461
323	Kab. Minahasa Utara	1.068.308.456	1.865.229.780	-	2.220.492	63.600	466.660	-	-	-	-	3.062.059.431
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	1.180.256.150	2.111.148.000	-	7.775.300	12.505.000	-	219.400.000	-	-	-	3.570.612.303
325	Kota Kotamobagu	527.269.562	292.272.330	-	17.827.700	-	-	25.154.691	-	1.160.550	-	863.770.383
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	830.076.925	2.381.880.500	-	146.469.422	13.273.200	-	321.599.100	-	-	-	3.798.154.247
327	Kab. Minahasa Tenggara	238.784.859	2.004.778.889	-	118.416.000	51.625.616	-	102.153.440	-	-	-	2.515.758.804
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	164.145.011	1.019.476.128	-	191.592	34.419.827	-	9.387.887	-	-	-	1.228.728.655
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	360.682.100	2.427.705.500	-	103.173.000	43.395.480	-	-	-	-	-	2.940.462.630
330	Provinsi Sulawesi Tengah	-	999.300.672	56.790.001	23.785.475	-	-	11.420.200	-	392.646.076	-	1.485.017.829
331	Kab. Banggai	1.048.531.147	2.530.463.016	6.041.500	80.801.800	20.453.031	-	-	-	-	-	3.752.750.095
332	Kab. Banggai Kepulauan	152.639.000	2.498.309.000	-	2.900.000	10.000	-	-	-	-	-	3.182.656.269
333	Kab. Buol	770.514.400	3.093.341.000	-	23.887.310	18.418.642	-	39.716.800	-	-	-	3.946.339.581
334	Kab. Tolitoli	486.200.100	2.454.198.837	-	2.055.000	-	99.433.500	-	-	-	-	3.041.887.437
335	Kab. Donggala	1.068.607.224	4.680.458.000	-	82.369.000	168.652.450	-	-	-	6.009.000	-	6.006.095.674
336	Kab. Morowali	304.609.841	2.677.314.000	-	44.280.850	54.012.960	-	-	-	14.549.850	-	3.094.942.551
337	Kab. Poso	638.135.714	3.736.978.710	-	60.235.500	259.825.000	-	338.587	-	4.161.500	-	4.705.640.406
338	Kota Palu	1.120.923.546	1.881.995.160	-	158.552.110	34.819.400	-	-	-	18.535.990	-	3.403.842.965
339	Kab. Parigi Moutong	842.568.658	4.444.787.681	-	179.480	89.380	-	-	-	5.561.040	-	5.344.222.988
340	Kab. Tojo Una Una	162.909.825	2.026.036.826	-	66.250	94.388.685	-	134.302.150	-	-	-	2.417.703.736
341	Kab. Sigi	387.746.409	4.908.943.000	-	15.224	-	-	6.929.071	-	813.645	-	5.304.545.349
342	Kab. Banggai Laut	510.936.910	1.654.238.704	-	75.215.400	-	-	-	-	-	-	2.278.625.403
343	Kab. Morowali Utara	232.393.428	4.058.188.500	-	91.672.800	57.500.000	-	-	-	15.881.172	-	4.525.103.229
344	Provinsi Sulawesi Selatan	-	1.867.563.047	58.527.336	55.770.320	-	-	138.002.494	-	1.382.831	-	2.466.010.528
345	Kab. Bantaeng	569.799.300	2.538.080.500	-	1.765.000	-	425	219.400.000	-	-	-	3.329.045.225
346	Kab. Barru	538.428.050	3.198.985.500	-	15.315.000	21.195.150	-	-	-	40.000	-	3.951.706.721
347	Kab. Bone	1.006.473.900	751.391.321	-	45.295.600	21.600.000	-	172.860.000	-	-	-	2.010.062.212
348	Kab. Bulukumba	1.726.428.739	3.259.180.500	-	47.156	26.030.282	270.453.990	-	-	30.027.000	-	5.509.445.312
349	Kab. Enrekang	342.382.840	2.317.836.088	-	6.337.000	1.052.500	-	182.264.661	-	5.750.000	-	2.955.995.780
350	Kab. Gowa	772.018.488	4.163.269.966	247.040	48.573.100	-	-	-	-	-	-	5.063.061.586
351	Kab. Jeneponto	174.290.500	1.469.040.745	-	22.500	3.346.800	-	-	-	-	-	1.654.014.545
352	Kab. Luwu	2.139.936.802	4.074.083.739	-	1.673.160	27.459.900	-	100.000	-	-	-	6.248.998.781
353	Kab. Luwu Utara	704.700.193	2.995.879.500	-	43.170.000	100	-	2.204.000	-	-	-	3.746.025.810
354	Kab. Maros	81.365.000	3.122.239.000	129.050.000	34.066.600	-	-	98.874.000	-	150	-	4.634.359.550
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	761.992.425	1.514.945.459	-	16.140.000	4.000.000	13.777.000	-	-	7.020.000	-	2.418.525.774
356	Kota Palopo	433.390.300	699.874.189	-	21.527.750	-	1.990.000	-	-	4.530.000	-	1.161.422.239
357	Kab. Luwu Timur	858.751.427	3.099.101.000	-	25.981.994	63.250.000	11.086.000	897.349	-	-	-	4.059.201.496
358	Kab. Pinrang	66.880.456	1.604.841.358	-	20.600.000	5.185.800	-	-	-	29.129.000	-	1.785.873.345
359	Kab. Sinjai	741.776.458	5.011.395.000	-	33.895.000	-	504.000	178.393.050	-	-	-	5.965.963.508
360	Kab. Kepulauan Selayar	1.004.804.882	3.126.966.500	24.319.254	73.706.000	6.437.000	100.000.000	-	-	2.600.000	-	4.428.748.365
361	Kab. Sidenreng Rappang	309.555.433	39.891.500	-	45.649.000	26.948.000	173.698.500	-	-	-	-	848.352.576
362	Kab. Soppeng	394.991.540	3.880.927	-	85.147.500	8.160.000	-	-	-	9.000.000	-	522.153.067
363	Kab. Takalar	809.949.984	986.908.510	-	130.493.675	-	-	-	-	-	-	2.023.103.219
364	Kab. Tana Toraja	1.694.481.000	6.049.968.500	-	35.126.200	27.600.000	7.282.000	-	-	5.362.000	-	8.172.583.633
365	Kab. Wajo	806.034.153	3.942.182.895	-	59.827.400	26.170.359	-	219.400.000	-	-	-	5.091.631.074
366	Kota Parepare	586.285.158	446.100.349	-	81.650.000	-	-	-	-	17.920.000	-	1.579.186.379
367	Kota Makassar	1.857.336.629	3.490.575.524	108.938.500	108.576.000	20.050.700	-	50.696.750	-	13.347.000	-	6.241.513.106
368	Kab. Toraja Utara	415.701.877	4.946.885.500	6.854.500	5.000	14.303.500	-	40.243.248	-	420.100	-	5.430.270.925
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	688.328.607	581.943.186	352.048.860	-	-	-	-	8.893.000	-	1.954.808.852

RINCIAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK LAINNYA
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAK Nonfisik										Total Penerimaan Bukan Pajak Lainnya
		Potongan SPM										
		Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dana Pelayanan Kepariwisataan	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	
(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14) = 5+6+7+8+9+10+11+12+13+14
370	Kab. Buton	389.858.500	3.088.778.500	-	3.691.000	22.208.940	-	299.000.000	-	-	-	3.865.763.200
371	Kab. Konawe	397.018.041	3.712.440.965	-	2.975.000	-	-	-	-	-	-	4.288.484.526
372	Kab. Kolaka	1.134.800.601	1.873.881.288	-	8.967.000	-	-	-	-	626.800	-	3.018.275.689
373	Kab. Muna	313.200.000	1.950.677.233	75.000	-	168.150	-	45.926.118	-	-	-	2.324.947.001
374	Kota Kendari	969.334.863	1.037.949.836	-	18.436.800	2.610.000	168.809.000	219.400.000	445.556.468	-	-	2.872.220.625
375	Kota Bau-bau	258.340.300	2.989.451.500	-	41.419.000	42.207.492	44.395.400	219.400.000	-	7.575.000	-	3.602.811.622
376	Kab. Konawe Selatan	1.496.840.968	5.267.406.500	-	14.408.400	22.415.000	-	23.278.500	-	-	-	6.829.224.111
377	Kab. Bombana	1.201.967.694	3.376.435.077	-	126.652.000	8.000.000	-	187.500.000	-	-	-	4.909.925.123
378	Kab. Wakatobi	320.115.392	5.505.799.000	-	18.351.000	29.236.000	12.801.000	-	395.985.220	-	-	6.285.413.888
379	Kab. Kolaka Utara	914.613.200	2.151.575.790	-	2.535.000	-	-	53.242.100	-	1.800.000	-	3.150.933.590
380	Kab. Konawe Utara	90.994.834	94.736.000	-	155.240.700	-	-	67.835.850	-	-	-	408.807.384
381	Kab. Buton Utara	444.721.290	1.977.935.000	-	3.967.000	-	-	-	-	-	-	2.547.381.642
382	Kab. Konawe Kepulauan	548.917.561	1.025.163.508	-	-	5.297.500	-	-	-	-	-	1.659.211.608
383	Kab. Kolaka Timur	593.661.100	2.585.996.500	-	17.929.000	100.000	-	-	-	-	-	3.231.550.829
384	Kab. Muna Barat	273.459.500	2.735.847.061	-	1.156.000	-	-	-	-	-	-	3.336.746.461
385	Kab. Buton Tengah	995.716.950	2.478.995.491	-	78.015.000	-	-	219.400.000	-	-	-	3.832.523.527
386	Kab. Buton Selatan	138.365.293	1.605.542.925	-	-	-	-	299.000.000	-	-	-	2.043.187.795
387	Provinsi Bali	-	352.364.664	430.404.676	58.298.000	-	-	219.352.914	-	236.945.528	-	1.444.836.587
388	Kab. Badung	2.908.720.332	2.589.919.000	31.367.068	20.519.850	5.199.750	-	-	-	47.122.186	-	6.300.526.050
389	Kab. Bangli	1.122.709.117	1.625.178.886	-	98.509.400	3.604.000	401.277.600	-	-	4.756.350	-	3.258.293.277
390	Kab. Buleleng	2.386.706.006	3.685.185.000	15.697.950	56.214.214	34.094.940	171.560.679	-	-	9.519.504	-	6.897.342.339
391	Kab. Gianyar	1.006.953.706	2.214.969.000	-	26.794.793	66.136.396	-	-	-	92.420.915	-	4.023.767.733
392	Kab. Jembrana	878.847.674	3.867.635.220	-	158.267.332	34.565.800	-	-	-	10.970.150	-	5.769.440.721
393	Kab. Karangasem	1.890.861.287	1.982.502.500	-	78.752.000	172.301.000	-	104.351.450	-	9.534.900	-	4.618.261.721
394	Kab. Klungkung	1.021.448.106	1.428.742.644	8.627.850	124.098.000	365.000	347.528.524	-	-	7.964.400	-	3.043.954.324
395	Kab. Tabanan	1.302.792.633	3.345.792.500	78.718.591	196.449.800	87.459.735	-	-	-	1.546.081	-	6.270.201.339
396	Kota Denpasar	4.056.948.015	2.156.185.000	-	25.590.000	71.575.000	-	299.000.000	-	14.330.935	-	6.696.177.521
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	721.365.568	39.732.598	23.297.314	-	-	15.593.107	-	87.749.862	-	887.738.449
398	Kab. Bima	1.435.688.500	2.485.697.347	17.930.850	101.418.000	53.809.000	-	37.447.200	-	-	-	4.131.990.897
399	Kab. Dompu	188.677.076	695.853.606	-	5.969.950	500.000	-	23.038.000	-	-	-	914.038.632
400	Kab. Lombok Barat	1.884.066.025	2.616.508.691	-	109.675.000	85.389.000	45.628.000	74.195.650	-	-	-	4.868.659.866
401	Kab. Lombok Tengah	3.537.553.082	5.237.888.423	-	53.480.500	67.590.000	516.900	194.828.560	104.791.000	27.769.940	-	9.362.982.833
402	Kab. Lombok Timur	1.446.615.038	3.875.826.158	-	-	91.500	-	1.085.796	-	28.600.000	-	5.421.778.098
403	Kab. Sumbawa	1.094.078.600	4.325.409.500	33.798.700	69.405.840	35.186.911	-	117.968.141	-	955.132	-	5.845.909.598
404	Kota Mataram	1.685.390.597	2.122.457.224	-	98.125.288	-	32.851.950	26.268.125	-	29.796.200	-	3.994.889.384
405	Kota Bima	108.902.758	2.393.370.494	-	26.705.200	1.000	-	116.274.921	-	23.508.371	-	2.668.762.744
406	Kab. Sumbawa Barat	240.348.143	2.091.142.901	-	5.264.700	-	-	11.908.600	-	10.900.000	-	2.359.564.344
407	Kab. Lombok Utara	218.018.000	1.539.521.431	-	45.837.300	6.089.761	-	-	113.311.000	12.500	-	1.922.789.992
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	3.574.030.450	84.043.469	41.362.800	-	-	73.078.221	-	371.747.576	-	4.144.262.516
409	Kab. Alor	974.048.400	6.209.969.500	250.292.450	1.207.215	-	-	-	-	1.122.361	-	7.474.341.827
410	Kab. Belu	341.418.000	5.307.558.500	-	56.915.000	42.111.504	-	6.800.000	-	103.500	-	7.883.928.407
411	Kab. Ende	1.588.247.518	5.793.892.500	-	12.704.000	-	-	-	-	13.896.381	-	7.442.633.394
412	Kab. Flores Timur	1.207.297.600	1.721.999.786	-	5.441.564	35.175.000	-	-	-	301.375	-	3.011.750.625
413	Kab. Kupang	1.707.403.020	7.303.995.500	-	2.401.000	191.190.000	-	-	-	-	-	9.240.187.970
414	Kab. Lembata	126.794.185	2.988.340.000	-	117.050.462	124.680	-	-	-	5.023.300	-	3.437.720.647
415	Kab. Manggarai	2.040.101.800	6.173.195.000	-	10.745.100	-	-	-	-	11.639.494	-	8.316.504.047
416	Kab. Ngada	632.768.208	1.766.418.212	-	4.400	-	96.491.360	-	-	1.393.200	-	2.497.075.380
417	Kab. Sikka	677.924.484	5.213.831.080	-	51.051.100	21.168.000	6.452.300	-	-	6.656.300	-	5.977.083.264
418	Kab. Sumba Barat	850.460	2.552.132.000	-	243.510.650	58.800.000	-	-	-	7.325.800	-	2.862.618.910
419	Kab. Sumba Timur	318.448.750	5.631.192.000	-	124.761.100	104.420.000	-	49.500	-	-	-	6.278.179.204
420	Kab. Timor Tengah Selatan	2.601.774.700	8.554.322.500	-	89.071.095	-	-	73.974.000	-	-	-	11.319.142.295
421	Kab. Timor Tengah Utara	301.517.779	1.818.424.586	-	2.856.799	-	-	32.405.499	-	32.551.486	-	2.187.756.149
422	Kota Kupang	1.335.721.972	1.184.204.852	-	178.548.800	15.000.000	-	-	-	11.100.000	-	2.724.575.624

RINCIAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK LAINNYA
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAK Nonfisik										Total Penerimaan Bukan Pajak Lainnya
		Potongan SPM										
		Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dana Pelayanan Kepariwisataan	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	
(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14) = 5+6+7+8+9+10+11+12+13+14
423	Kab. Rote Ndao	569.553.700	96.533.193	-	14.183.027	34.348.000	750	-	-	-	-	829.972.630
424	Kab. Manggarai Barat	2.163.089.244	3.246.945.949	-	52.395.500	24.264.205	9.116.800	-	352.746.071	-	-	5.848.557.769
425	Kab. Nagekeo	1.162.922.250	3.377.267.000	-	91.260.000	118.598.088	-	-	-	-	-	4.817.041.401
426	Kab. Sumba Barat Daya	2.477.156.700	3.273.043.661	-	149.930.000	21.454.405	-	-	-	-	-	6.027.255.623
427	Kab. Sumba Tengah	744.045.100	1.019.877.252	-	17.866.140	67.281.000	-	145.868.958	-	-	-	1.996.144.450
428	Kab. Manggarai Timur	2.297.400	7.401.241.420	-	-	4.710.500	-	-	-	18.449.800	-	8.261.585.463
429	Kab. Sabu Raijua	1.125.930.000	1.856.120.499	-	164.446.400	38.000	-	228.383.600	-	-	-	4.485.632.203
430	Kab. Malaka	504.115.400	4.206.247.500	-	1.880.000	-	-	-	-	-	-	4.712.242.900
431	Provinsi Maluku	-	921.078.448	120.499.421	259.085.292	-	-	118.920.804	-	664.044.970	-	2.116.808.189
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	1.432.992.000	1.964.243.523	-	2.485.000	21.600.000	-	219.400.000	-	-	-	3.669.230.909
433	Kab. Maluku Tengah	474.606.020	4.448.567.500	-	5.020.000	6.070.000	-	-	-	-	-	4.934.523.040
434	Kab. Maluku Tenggara	832.298.650	12.883.800	-	-	-	-	-	-	-	-	855.110.626
435	Kab. Buru	365.746.531	560.212.022	-	-	17.810.000	-	51.577.900	-	-	-	1.147.670.606
436	Kota Ambon	24.104.214	3.401.733.500	-	488.580	-	-	3.696.000	-	1.071	-	4.225.301.078
437	Kab. Seram Bagian Barat	44.952.600	3.159.949.595	-	10.672.050	-	-	-	-	-	-	3.215.574.245
438	Kab. Seram Bagian Timur	138.906.300	2.389.617.000	-	6.726.400	-	-	-	-	-	-	2.535.458.060
439	Kab. Kepulauan Aru	367.663.600	5.716.182.000	-	154.302.000	-	-	-	-	-	-	10.570.459.787
440	Kota Tual	426.337.750	2.033.030.000	-	2.392.234	226.250	-	89.305.000	-	-	-	2.551.291.234
441	Kab. Maluku Barat Daya	778.540.100	5.858.657.000	-	46.232.600	-	-	-	-	-	-	6.698.374.445
442	Kab. Buru Selatan	89.269.500	58.170.500	-	1.930.000	-	-	-	-	-	-	149.370.000
443	Provinsi Papua	-	823.256.009	1.600.000	-	-	-	212.120	-	96.284.984	-	1.236.168.608
444	Kab. Biak Numfor	100	4.838.220.500	-	500	940.000	-	-	174.349.000	-	-	5.112.010.100
445	Kab. Jayapura	57.556.849	648.884.080	-	255.724	6.000.000	-	-	-	-	-	1.102.195.934
446	Kab. Jayawijaya	77.602.100	4.452.159.260	-	171.999.000	669.000	-	-	-	-	-	4.710.689.360
447	Kab. Merauke	357.910.500	4.003.913.000	-	5.563.000	43.537.500	-	-	-	-	-	7.767.261.510
448	Kab. Mimika	262.036.976	418.267.150	-	161.700.000	17.606.000	-	32.722.226	-	28.000.000	-	920.332.352
449	Kab. Nabire	436.214.000	6.359.766.000	-	4.789.250	-	17.508.326	-	-	98.500.000	-	6.916.777.576
450	Kab. Paniai	-	208.254.862	-	-	32.840.000	-	-	-	-	-	248.331.854
451	Kab. Puncak Jaya	5.804.300	1.486.553.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.387.898.300
452	Kab. Kepulauan Yapen	10.596.400	902.967.200	-	2.225.500	-	23.070.000	-	-	-	-	1.114.189.246
453	Kota Jayapura	942.780.073	651.340.100	-	3.400.000	-	-	-	-	-	-	1.601.020.581
454	Kab. Sarmi	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	31
455	Kab. Keerom	94.405.600	2.510.384.500	-	1.893.200	-	-	16.136.800	-	-	-	2.622.820.100
456	Kab. Yahukimo	-	377.300.500	-	-	-	-	-	-	-	-	509.700.500
457	Kab. Pegunungan Bintang	57.351.000	335.450.000	-	7.650.000	-	-	-	-	-	-	3.318.644.330
458	Kab. Tolikara	-	1.002.364.940	-	-	-	-	-	-	-	-	1.002.364.940
459	Kab. Boven Digoel	217.394.000	2.836.645.000	-	82.097.000	-	-	-	-	6.140.000	-	3.142.277.715
460	Kab. Mappi	299.304.600	2.736.676.500	-	37.450.000	89.200.000	-	-	-	7.650.000	-	3.195.481.101
461	Kab. Asmat	665.189.434	1.671.537.000	-	-	754.687	-	-	-	-	-	2.344.076.495
462	Kab. Waropen	-	13.000	-	-	-	-	-	-	-	-	13.000
463	Kab. Supiori	-	379.034.420	-	338.000	-	-	-	-	-	-	926.326.620
464	Kab. Mamberamo Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	518.122.520
465	Kab. Mamberamo Tengah	300	2.196.950	-	-	-	-	-	-	-	-	2.197.250
466	Kab. Yalimo	280.350.000	1.229.013.500	-	5.458.000	-	-	-	-	-	-	1.514.821.500
467	Kab. Lanny Jaya	4.201.176	148.907.480	-	-	-	-	-	-	-	-	153.108.656
468	Kab. Nduga	156.011.000	1.459.260	-	-	-	-	-	-	2.289.000	-	159.759.260
469	Kab. Dogiyai	313.600.000	284.232.000	-	987.300	-	-	-	-	-	-	598.819.300
470	Kab. Puncak	-	91.713.096	-	-	-	-	-	-	-	-	2.031.943.096
471	Kab. Intan Jaya	-	280.600.000	-	9.956.000	9.832.400	-	-	-	-	-	937.315.540
472	Kab. Deiyai	92.000	-	-	83.000	-	-	-	-	-	-	175.000
473	Provinsi Maluku Utara	-	920.928.900	-	105.340.000	-	-	29.302.000	-	6.048.100	-	1.061.619.000
474	Kab. Halmahera Tengah	20.593.000	533.968.655	-	50.000	70.380.000	-	-	-	-	-	624.991.655
475	Kota Ternate	258.397.342	808.094.259	-	3	66.191.950	20.557.659	110.120.000	-	83.514.650	-	1.346.875.863

RINCIAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK LAINNYA
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAK Nonfisik										Total Penerimaan Bukan Pajak Lainnya
		Potongan SPM										
		Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dana Pelayanan Kepariwisataan	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	
(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14) = 5+6+7+8+9+10+11+12+13+14
476	Kab. Halmahera Barat	12.052.400	599.758.000	-	-	-	-	107.230.500	-	-	-	720.540.900
477	Kab. Halmahera Timur	8.026.050	4.549.517.885	-	22.191.000	-	-	-	-	-	-	4.579.734.935
478	Kab. Halmahera Selatan	261.341.850	2.596.895.367	-	12.127.550	2.009.575	-	85.373	-	-	-	2.872.459.715
479	Kab. Halmahera Utara	193.563.000	5.313.628.778	-	-	-	-	-	-	-	-	5.507.191.778
480	Kab. Kepulauan Sula	57.900.200	2.091.699.305	-	47.399.700	841	-	-	-	-	-	2.197.000.046
481	Kota Tidore Kepulauan	206.811.075	1.466.687.958	-	11.000.000	-	-	-	-	200	-	1.711.119.533
482	Kab. Pulau Morotai	86.738.300	1.518.615.600	-	8.301.300	-	-	-	-	56.070.000	-	1.669.725.200
483	Kab. Pulau Taliabu	95.787.200	149.000.000	-	1.476.000	-	-	-	-	-	-	246.263.200
484	Provinsi Banten	-	752.826.656	-	420.806.000	-	-	7.701.340	-	354.139.000	-	1.535.472.996
485	Kab. Lebak	986.131.850	44.623	12.522.000	48.176.100	34.150.500	55.160.000	25.487.462	81.843.397	-	-	1.272.587.312
486	Kab. Pandeglang	3.746.629.925	5.508.819.500	-	12.785.466	43.750.000	20.726.000	50.456.124	-	-	-	10.524.162.215
487	Kab. Serang	3.966.999.430	6.641.708.000	-	60.840.000	31.833.360	-	-	-	-	-	10.701.380.790
488	Kab. Tangerang	1.901.394.537	6.981.949.930	-	88.805.600	39.120.200	-	-	-	-	-	9.100.075.617
489	Kota Cilegon	1.168.748.400	871.396.315	-	124.592.000	75.287.500	-	46.328.329	-	65.950.000	-	2.352.302.544
490	Kota Tangerang	2.148.447.710	4.212.296.282	-	61.345.995	65.000.000	-	-	-	79.082.600	-	6.601.541.682
491	Kota Serang	1.478.930.112	1.006.522.020	-	1.794.000	-	-	102.634.164	-	-	-	2.589.880.296
492	Kota Tangerang Selatan	3.445.570.606	3.232.108.767	-	28.202.200	2.570.750	-	36.370.260	-	4.500.000	-	6.784.352.583
493	Provinsi Bangka Belitung	-	689.653.051	-	174.263.537	-	-	151.450.425	-	112.339.308	-	1.376.253.806
494	Kab. Bangka	818.889.976	2.530.679.239	-	29.019.200	5.029.000	-	187.500.000	-	2.841.695	-	4.491.590.227
495	Kab. Belitung	754.645.075	1.417.038.297	167.417.938	103.074.224	14.190.484	175.870.486	-	-	33.093.408	-	2.805.135.225
496	Kota Pangkal Pinang	650.846.545	724.815.170	-	187.800.000	900.000	-	-	-	12.240.000	-	1.810.758.089
497	Kab. Bangka Selatan	473.416.500	1.707.379.210	-	218.380.500	4.965.800	88.919.000	128.341.950	-	53.569.050	-	2.697.038.981
498	Kab. Bangka Tengah	581.933.560	3.119.676.812	-	164.492.000	26.982.500	18.130.000	279.015.484	-	550.000	-	4.218.547.010
499	Kab. Bangka Barat	715.792.560	1.545.829.680	-	148.385.000	19.412.870	147.711.608	219.400.000	-	39.415.923	-	2.890.829.861
500	Kab. Belitung Timur	323.271.850	1.892.186.461	-	91.018.000	22.500.000	184.442.472	172.756.780	308.834.935	8.896.990	-	3.005.103.707
501	Provinsi Gorontalo	-	215.146.335	108.986.392	91.105.796	-	-	83.283.658	-	37.333.005	-	535.855.186
502	Kab. Boalemo	637.650.904	3.237.024.500	-	3.265.215	97.191.000	-	5.262.230	-	-	-	4.051.937.935
503	Kab. Gorontalo	1.370.408.231	1.373.995.432	-	43.646.500	1.970.186	-	63.094.150	-	-	-	2.863.675.199
504	Kota Gorontalo	739.407.100	1.968.158.500	-	92.527.400	-	-	-	-	1.010.500	-	2.852.407.731
505	Kab. Pohuwato	617.700.436	2.873.425.500	-	39.788.000	19.789.000	-	-	-	-	-	3.565.809.116
506	Kab. Bone Bolango	552.427.383	1.798.916.500	-	19.683.700	42.306.950	-	203.262.566	-	-	-	2.616.620.071
507	Kab. Gorontalo Utara	423.018.001	3.005.279.569	-	18.058.500	75.221.600	-	212.592.412	-	-	-	4.071.290.120
508	Provinsi Kepulauan Riau	-	231.656.385	-	50.429.908	-	-	50.474.889	-	178.243.355	-	675.922.067
509	Kab. Natuna	837.046.200	2.881.279.500	-	155.328.749	16.590.600	86.333.800	189.096.696	-	99.217.508	-	4.310.337.961
510	Kab. Kepulauan Anambas	357.769.268	276.223.379	-	210.622.120	78.928.138	-	-	-	-	-	965.737.924
511	Kab. Karimun	1.173.383.234	2.116.194.500	-	79.635.000	-	-	-	-	-	-	3.629.684.098
512	Kota Batam	4.788.411.379	2.757.150.384	94.185.350	89.544.960	15.065.000	97.116.025	-	-	27.514.555	-	8.246.166.734
513	Kota Tanjung Pinang	679.529.955	1.259.904.530	15.965.909	22.027.763	2.245.760	4.371.573	13.013.583	188.915.817	-	-	2.381.980.749
514	Kab. Lingga	590.499.738	2.992.962.000	20.873.940	122.273.910	29.786	-	170.207.000	-	-	-	3.898.305.817
515	Kab. Bintan	586.918.038	3.384.338.000	214.676.080	116.094.000	3.756.259	-	-	-	22.473.708	-	5.337.694.339
516	Provinsi Papua Barat	-	1.106.063.258	-	198.730.000	-	-	4.439.632	-	796.026.521	-	2.105.259.411
517	Kab. Fak Fak	153.714.081	1.604.895	-	94.240.606	-	750.000	12.823.090	-	-	-	458.244.494
518	Kab. Manokwari	10.630.550	4.332.448.175	-	-	-	9.001.000	-	-	6.107.800	-	4.504.099.244
519	Kab. Sorong	-	1.613.733.700	-	3.302.000	400.000	46.500	-	-	8.316.000	-	1.625.918.200
520	Kota Sorong	-	451.169.614	-	-	-	-	-	-	-	-	458.271.659
521	Kab. Raja Ampat	-	2.970.279.500	-	214.000	175.000.000	1.393.086	-	-	-	-	3.146.902.586
522	Kab. Sorong Selatan	-	3.169.256.179	-	-	7.100.000	-	-	-	-	-	3.181.398.179
523	Kab. Teluk Bintuni	236.303.000	3.127.728.500	-	242.250	-	-	-	-	-	-	3.364.273.750
524	Kab. Teluk Wondama	19.737.000	75.858.007	-	60.721.400	-	3.947.768	50.589.000	748.163.140	-	-	959.016.315
525	Kab. Kaimana	34.816.000	2.514.565.000	-	93.076.420	-	-	-	-	-	-	2.966.907.020
526	Kab. Maybrat	200	462.344.012	-	-	6.250.000	-	-	-	-	-	468.594.212
527	Kab. Tambrauw	-	893.756.779	-	-	-	1.470.669	-	-	-	-	895.589.073
528	Kab. Manokwari Selatan	672.390.050	729.595.729	-	-	-	-	-	-	-	-	1.501.701.779

RINCIAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK LAINNYA
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAK Nonfisik										Total Penerimaan Bukan Pajak Lainnya
		Potongan SPM										
		Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dana Pelayanan Kepariwisataan	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	
(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14) = 5+6+7+8+9+10+11+12+13+14
529	Kab. Pegunungan Arfak	-	723.190.405	-	-	-	-	-	-	-	-	723.190.405
530	Provinsi Sulawesi Barat	-	226.190.657	148.933.288	14.022.800	-	-	48.653.018	-	272.800.502	-	713.650.638
531	Kab. Majene	-	764.009.819	538.310	55.908.840	-	-	83.456.776	-	-	-	908.025.345
532	Kab. Mamuju	470.055.628	1.413.582.995	-	65.685.600	7.048.000	-	59.705.000	-	-	-	2.019.225.270
533	Kab. Polewali Mandar	692.271.300	3.497.310.728	-	59.277.800	-	-	-	-	-	-	4.391.484.828
534	Kab. Mamasa	203.870.808	1.610.956.024	-	84.715.000	3.982.500	-	-	-	-	-	1.903.972.432
535	Kab. Pasangkayu	591.161.400	2.468.273.387	-	11.637.673	641.600	-	57.861.890	-	-	-	3.131.793.914
536	Kab. Mamuju Tengah	325.740.400	1.902.667.155	-	435.000	-	-	-	-	-	-	2.232.059.164
537	Provinsi Kalimantan Utara	-	940.718.192	-	55.829.870	-	-	63.694.847	-	988.965.472	-	2.049.212.041
538	Kab. Bulungan	604.834.061	3.299.751.439	-	104.065.200	19.526.878	-	-	-	92.812.863	-	4.154.402.214
539	Kab. Malinau	931.179.471	2.596.185.000	-	135.849.415	31.090.000	50.804.000	-	-	52.270.624	-	3.797.571.706
540	Kab. Nunukan	1.543.740.072	4.086.153.618	-	7.982.040	125.598.670	-	-	-	-	-	5.884.174.325
541	Kota Tarakan	657.034.278	1.717.629.252	77.354.018	177.350.000	27.202.366	-	-	-	-	-	3.011.125.266
542	Kab. Tana Tidung	507.057.168	1.441.628.500	-	224.350.000	67.846.597	-	179.147.000	-	-	-	2.485.104.362
SETORAN PNBP (425919) DAK NONFISIK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.460.227.535
SETORAN PNBP (425919) DAK FISIK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.021.249.646
SETORAN PNBP (425916) HIBAH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.903.801
	Jumlah	619.183.368.149	1.513.407.777.399	7.916.257.432	31.843.158.427	11.944.365.900	7.127.058.421	26.325.087.148	11.382.945.644	13.478.006.511	148.405	2.362.911.064.334

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Tahun 2023					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(8)=(6)+(7)
1	Provinsi Aceh	150.850.373.000	344.841.090.000	495.691.463.000	150.465.356.300	344.841.090.000	495.306.446.300
2	Kab. Aceh Barat	52.393.282.000	220.708.463.000	273.101.745.000	52.371.406.000	220.673.029.050	273.044.435.050
3	Kab. Aceh Besar	13.145.913.000	16.539.955.000	29.685.868.000	13.131.766.800	16.537.120.900	29.668.887.700
4	Kab. Aceh Selatan	7.231.900.000	18.535.412.000	25.767.312.000	7.231.900.000	18.512.950.750	25.744.850.750
5	Kab. Aceh Singkil	10.863.359.000	22.964.100.000	33.827.459.000	10.854.608.600	22.948.329.100	33.802.937.700
6	Kab. Aceh Tengah	11.780.363.000	27.742.152.000	39.522.515.000	11.412.349.175	27.742.152.000	39.154.501.175
7	Kab. Aceh Tenggara	5.301.960.000	16.123.095.000	21.425.055.000	5.279.624.475	16.123.095.000	21.402.719.475
8	Kab. Aceh Timur	56.895.436.000	31.011.724.000	87.907.160.000	56.870.417.425	30.904.277.200	87.774.694.625
9	Kab. Aceh Utara	49.879.914.000	27.820.674.000	77.700.588.000	49.853.378.850	27.777.058.800	77.630.437.650
10	Kab. Bireuen	8.999.429.000	17.508.203.000	26.507.632.000	8.977.387.250	17.503.838.000	26.481.225.250
11	Kab. Pidie	8.799.804.000	25.586.896.000	34.386.700.000	8.760.337.125	25.582.063.000	34.342.400.125
12	Kab. Simeulue	4.245.590.000	17.629.677.000	21.875.267.000	4.090.999.600	17.629.677.000	21.720.676.600
13	Kota Banda Aceh	40.590.135.000	12.296.814.000	52.886.949.000	40.563.602.025	12.296.814.000	52.860.416.025
14	Kota Sabang	4.548.365.000	11.675.779.000	16.224.144.000	4.548.365.000	11.675.779.000	16.224.144.000
15	Kota Langsa	9.635.885.000	17.619.499.000	27.255.384.000	9.614.009.000	17.586.205.350	27.200.214.350
16	Kota Lhokseumawe	14.989.996.000	16.218.110.000	31.208.106.000	14.971.282.030	16.218.110.000	31.189.392.030
17	Kab. Gayo Lues	6.827.057.000	19.204.279.000	26.031.336.000	6.676.402.850	19.204.279.000	25.880.681.850
18	Kab. Aceh Barat Daya	6.270.241.000	25.562.080.000	31.832.321.000	6.257.115.400	25.537.243.000	31.794.358.400
19	Kab. Aceh Jaya	5.462.766.000	29.575.454.000	35.038.220.000	5.440.890.000	29.575.454.000	35.016.344.000
20	Kab. Nagan Raya	22.063.123.000	84.904.698.000	106.967.821.000	22.049.731.180	84.873.704.100	106.923.435.280
21	Kab. Aceh Tamiang	78.660.343.000	26.839.908.000	105.500.251.000	78.660.343.000	26.839.908.000	105.500.251.000
22	Kab. Bener Meriah	5.055.149.000	16.228.164.000	21.283.313.000	5.028.423.650	16.220.117.550	21.248.541.200
23	Kab. Pidie Jaya	5.371.431.000	16.012.323.000	21.383.754.000	5.353.895.940	16.012.323.000	21.366.218.940
24	Kota Subulussalam	6.100.656.000	18.076.940.000	24.177.596.000	6.078.780.000	18.056.914.850	24.135.694.850
25	Provinsi Sumatera Utara	506.384.430.000	149.873.847.000	656.258.277.000	506.384.430.000	149.873.847.000	656.258.277.000
26	Kab. Asahan	60.946.510.000	22.204.671.000	83.151.181.000	60.946.510.000	22.014.178.350	82.960.688.350
27	Kab. Dairi	12.756.773.000	12.667.783.000	25.424.556.000	12.756.773.000	12.667.783.000	25.424.556.000
28	Kab. Deli Serdang	79.914.943.000	13.416.125.000	93.331.068.000	79.914.943.000	13.416.125.000	93.331.068.000
29	Kab. Karo	15.666.432.000	11.904.237.000	27.570.669.000	15.666.432.000	11.568.533.800	27.234.965.800
30	Kab. Labuhanbatu	44.358.591.000	40.609.494.000	84.968.085.000	44.358.591.000	40.250.894.300	84.609.485.300
31	Kab. Langkat	121.303.564.000	20.886.187.000	142.189.751.000	121.303.564.000	20.886.187.000	142.189.751.000
32	Kab. Mandailing Natal	42.490.857.000	36.964.511.000	79.455.368.000	42.490.857.000	36.964.511.000	79.455.368.000
33	Kab. Nias	9.104.294.000	8.942.951.000	18.047.245.000	9.104.294.000	8.942.951.000	18.047.245.000
34	Kab. Simalungun	58.888.855.000	21.227.613.000	80.116.468.000	58.888.855.000	20.705.829.450	79.594.684.450
35	Kab. Tapanuli Selatan	87.206.106.000	122.142.849.000	209.348.955.000	87.206.106.000	122.142.849.000	209.348.955.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	14.687.821.000	20.054.039.000	34.741.860.000	14.687.821.000	20.054.039.000	34.741.860.000
37	Kab. Tapanuli Utara	49.637.139.000	17.382.260.000	67.019.399.000	49.637.139.000	17.382.260.000	67.019.399.000
38	Kab. Toba Samosir	16.540.758.000	11.523.734.000	28.064.492.000	16.540.758.000	11.523.734.000	28.064.492.000
39	Kota Binjai	16.559.315.000	11.513.424.000	28.072.739.000	16.559.315.000	11.513.424.000	28.072.739.000
40	Kota Medan	275.112.683.000	7.824.170.000	282.936.853.000	275.112.683.000	7.824.170.000	282.936.853.000
41	Kota Pematang Siantar	25.843.606.000	6.288.811.000	32.132.417.000	25.843.606.000	6.288.811.000	32.132.417.000
42	Kota Sibolga	12.699.397.000	5.896.935.000	18.596.332.000	12.699.397.000	5.896.935.000	18.596.332.000
43	Kota Tanjung Balai	11.890.873.000	6.623.250.000	18.514.123.000	11.890.873.000	6.623.250.000	18.514.123.000
44	Kota Tebing Tinggi	13.036.877.000	6.317.354.000	19.354.231.000	13.036.877.000	6.317.354.000	19.354.231.000
45	Kota Padang Sidempuan	14.111.871.000	16.829.171.000	30.941.042.000	14.111.871.000	16.829.171.000	30.941.042.000
46	Kab. Pakpak Bharat	9.110.751.000	7.953.132.000	17.063.883.000	9.110.751.000	7.953.132.000	17.063.883.000
47	Kab. Nias Selatan	12.589.123.000	20.220.617.000	32.809.740.000	12.589.123.000	20.220.617.000	32.809.740.000
48	Kab. Humbang Hasundutan	11.362.907.000	9.755.469.000	21.118.376.000	11.362.907.000	9.755.469.000	21.118.376.000
49	Kab. Serdang Bedagai	47.393.958.000	14.554.428.000	61.948.386.000	47.393.958.000	14.554.428.000	61.948.386.000
50	Kab. Samosir	10.374.744.000	6.870.004.000	17.244.748.000	10.374.744.000	6.870.004.000	17.244.748.000
51	Kab. Batu Bara	29.963.467.000	14.236.247.000	44.199.714.000	29.963.467.000	14.236.247.000	44.199.714.000
52	Kab. Padang Lawas	28.809.912.000	27.512.342.000	56.322.254.000	28.809.912.000	27.512.342.000	56.322.254.000
53	Kab. Padang Lawas Utara	24.770.431.000	47.099.332.000	71.869.763.000	24.770.431.000	47.099.332.000	71.869.763.000
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	59.639.354.000	47.453.750.000	107.093.104.000	59.631.191.480	47.453.750.000	107.084.941.480
55	Kab. Labuhanbatu Utara	33.142.448.000	26.508.293.000	59.650.741.000	33.142.448.000	26.508.293.000	59.650.741.000
56	Kab. Nias Utara	9.289.679.000	15.984.361.000	25.274.040.000	9.289.679.000	15.984.361.000	25.274.040.000
57	Kab. Nias Barat	9.848.737.000	8.976.101.000	18.824.838.000	9.848.737.000	8.976.101.000	18.824.838.000
58	Kota Gunungsitoli	11.299.992.000	6.712.181.000	18.012.173.000	11.299.992.000	6.712.181.000	18.012.173.000
59	Provinsi Sumatera Barat	137.841.296.000	74.284.533.000	212.125.829.000	137.841.296.000	74.284.533.000	212.125.829.000
60	Kab. Lima Puluh Kota	7.567.728.000	28.665.288.000	36.233.016.000	7.567.728.000	28.665.288.000	36.233.016.000
61	Kab. Agam	12.360.044.000	12.686.444.000	25.046.488.000	12.360.044.000	12.612.388.600	24.972.432.600
62	Kab. Kepulauan Mentawai	6.927.560.000	13.566.201.000	20.493.761.000	6.926.281.040	13.566.201.000	20.492.482.040
63	Kab. Padang Pariaman	8.454.859.000	9.547.210.000	18.002.069.000	8.453.580.040	9.547.210.000	18.000.790.040
64	Kab. Pasaman	7.120.666.000	12.285.005.000	19.405.671.000	7.120.666.000	12.285.005.000	19.405.671.000
65	Kab. Pesisir Selatan	16.449.052.000	18.082.013.000	34.531.065.000	16.426.457.040	18.082.013.000	34.508.470.040
66	Kab. Sijunjung	8.708.293.000	38.423.366.000	47.131.659.000	8.707.014.040	38.423.366.000	47.130.380.040
67	Kab. Solok	7.989.039.000	19.829.777.000	27.818.816.000	7.986.461.820	19.654.187.400	27.640.649.220
68	Kab. Tanah Datar	8.363.714.000	12.658.340.000	21.022.054.000	8.363.714.000	12.658.340.000	21.022.054.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Tahun 2023					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(8)=(6)+(7)
69	Kota Bukit Tinggi	11.971.233.000	5.415.675.000	17.386.908.000	11.971.233.000	5.415.675.000	17.386.908.000
70	Kota Padang Panjang	5.801.340.000	5.174.488.000	10.975.828.000	5.800.061.040	5.174.488.000	10.974.549.040
71	Kota Padang	92.473.884.000	10.633.733.000	103.107.617.000	92.472.605.040	10.633.733.000	103.106.338.040
72	Kota Payakumbuh	7.762.209.000	5.377.878.000	13.140.087.000	7.762.209.000	5.377.878.000	13.140.087.000
73	Kota Sawahlunto	8.816.213.000	41.755.529.000	50.571.742.000	8.816.213.000	41.755.529.000	50.571.742.000
74	Kota Solok	8.681.404.000	10.748.890.000	19.430.294.000	8.681.404.000	10.748.890.000	19.430.294.000
75	Kota Pariaman	6.243.342.000	7.949.138.000	14.192.480.000	6.243.342.000	7.949.138.000	14.192.480.000
76	Kab. Pasaman Barat	20.642.641.000	24.257.918.000	44.900.559.000	20.642.641.000	24.257.918.000	44.900.559.000
77	Kab. Dharmasraya	17.826.574.000	24.009.840.000	41.836.414.000	17.826.574.000	23.557.940.900	41.384.514.900
78	Kab. Solok Selatan	32.513.753.000	33.142.255.000	65.656.008.000	32.512.474.040	32.950.700.700	65.463.174.740
79	Provinsi Riau	863.242.953.000	840.606.981.000	1.703.849.934.000	863.242.350.230	840.606.981.000	1.703.849.331.230
80	Kab. Bengkalis	1.590.457.418.000	933.913.425.000	2.524.370.843.000	1.590.457.313.420	933.913.425.000	2.524.370.738.420
81	Kab. Indragiri Hilir	88.656.237.000	276.706.064.000	365.362.301.000	88.656.111.000	276.706.064.000	365.362.175.000
82	Kab. Indragiri Hulu	117.349.847.000	172.134.348.000	289.484.195.000	117.349.721.000	172.134.348.000	289.484.069.000
83	Kab. Kampar	317.550.722.000	517.137.391.000	834.688.113.000	317.550.596.000	517.137.391.000	834.687.987.000
84	Kab. Kuantan Singingi	60.263.975.000	160.576.105.000	220.840.080.000	60.263.849.000	160.576.105.000	220.839.954.000
85	Kab. Pelalawan	196.578.970.000	292.785.412.000	489.364.382.000	196.578.844.000	292.785.412.000	489.364.256.000
86	Kab. Rokan Hilir	371.989.241.000	622.858.180.000	994.847.421.000	371.989.115.000	622.858.180.000	994.847.295.000
87	Kab. Rokan Hulu	102.172.825.000	289.659.843.000	391.832.668.000	102.172.699.000	289.659.843.000	391.832.542.000
88	Kab. Siak	528.721.002.000	538.522.540.000	1.067.243.542.000	528.720.876.000	538.522.540.000	1.067.243.416.000
89	Kota Dumai	90.319.115.000	455.717.567.000	546.036.682.000	90.318.989.000	455.717.567.000	546.036.556.000
90	Kota Pekanbaru	182.654.498.000	163.464.079.000	346.118.577.000	182.652.837.000	159.441.003.300	342.093.840.300
91	Kab. Kepulauan Meranti	93.268.840.000	172.406.752.000	265.675.592.000	93.268.714.000	172.406.752.000	265.675.466.000
92	Provinsi Jambi	193.333.890.000	355.576.336.000	548.910.226.000	193.311.267.735	355.576.336.000	548.887.603.735
93	Kab. Batanghari	100.246.131.000	213.116.645.000	313.362.776.000	100.241.418.075	213.116.645.000	313.358.063.075
94	Kab. Bungo	27.674.204.000	105.218.877.000	132.893.081.000	27.669.491.075	105.218.877.000	132.888.368.075
95	Kab. Kerinci	13.130.094.000	64.198.388.000	77.328.482.000	13.109.373.510	64.198.388.000	77.307.761.510
96	Kab. Merangin	14.745.264.000	89.194.014.000	103.939.278.000	14.739.117.300	89.194.014.000	103.933.131.300
97	Kab. Muaro Jambi	89.295.598.000	174.967.613.000	264.263.211.000	89.232.759.000	171.740.119.500	260.972.878.500
98	Kab. Sarolangun	54.838.538.000	225.683.827.000	280.522.365.000	54.775.699.000	222.875.539.200	277.651.238.200
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	271.390.516.000	565.465.779.000	836.856.295.000	271.357.211.330	564.000.758.700	835.357.970.030
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	60.635.975.000	152.823.662.000	213.459.637.000	60.573.136.000	152.823.662.000	213.396.798.000
101	Kab. Tebo	34.597.713.000	168.189.009.000	202.786.722.000	34.547.441.800	168.189.009.000	202.736.450.800
102	Kota Jambi	84.021.726.000	57.771.296.000	141.793.022.000	83.958.887.000	57.771.296.000	141.730.183.000
103	Kota Sungai Penuh	12.727.046.000	55.118.322.000	67.845.368.000	12.638.144.700	55.118.322.000	67.756.466.700
104	Provinsi Sumatera Selatan	774.587.119.000	1.760.073.093.000	2.534.660.212.000	774.535.795.950	1.760.073.093.000	2.534.608.888.950
105	Kab. Lahat	259.013.857.000	1.644.140.654.000	1.903.154.511.000	259.008.547.150	1.644.140.654.000	1.903.149.201.150
106	Kab. Musi Banyuasin	955.190.327.000	1.308.026.469.000	2.263.216.796.000	955.189.964.675	1.308.026.469.000	2.263.216.433.675
107	Kab. Musi Rawas	240.438.265.000	393.210.164.000	633.648.429.000	240.436.453.375	393.210.164.000	633.646.617.375
108	Kab. Muara Enim	620.197.487.000	1.123.641.374.000	1.743.838.861.000	620.192.656.000	1.120.287.384.900	1.740.480.040.900
109	Kab. Ogan Komering Ilir	77.615.331.000	190.258.910.000	267.874.241.000	77.610.500.000	190.258.910.000	267.869.410.000
110	Kab. Ogan Komering Ulu	103.213.073.000	210.811.706.000	314.024.779.000	103.208.242.000	210.811.706.000	314.019.948.000
111	Kota Palembang	149.284.051.000	211.267.831.000	360.551.882.000	149.279.220.000	211.267.831.000	360.547.051.000
112	Kota Prabumulih	124.848.251.000	241.423.411.000	366.271.662.000	124.843.420.000	241.423.411.000	366.266.831.000
113	Kota Pagar Alam	29.222.727.000	249.792.548.000	279.015.275.000	29.217.896.000	249.792.548.000	279.010.444.000
114	Kota Lubuk Linggau	31.416.862.000	159.333.787.000	190.750.649.000	31.412.031.000	159.333.787.000	190.745.818.000
115	Kab. Banyuasin	92.963.656.000	287.952.357.000	380.916.013.000	92.959.646.270	287.952.357.000	380.912.003.270
116	Kab. Ogan Ilir	73.151.366.000	200.054.008.000	273.205.374.000	73.151.003.675	200.054.008.000	273.205.011.675
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	35.092.211.000	165.351.499.000	200.443.710.000	35.088.201.270	165.351.499.000	200.439.700.270
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	31.539.497.000	185.227.222.000	216.766.719.000	31.525.299.890	185.227.222.000	216.752.521.890
119	Kab. Empat Lawang	29.038.940.000	233.980.103.000	263.019.043.000	29.034.930.270	233.980.103.000	263.015.033.270
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	513.516.237.000	295.196.667.000	808.712.904.000	513.512.227.270	295.196.667.000	808.708.894.270
121	Kab. Musi Rawas Utara	86.785.604.000	457.613.207.000	544.398.811.000	86.780.773.000	457.613.207.000	544.393.980.000
122	Provinsi Bengkulu	47.708.294.000	106.690.663.000	154.398.957.000	47.708.294.000	106.098.519.850	153.806.813.850
123	Kab. Bengkulu Selatan	5.026.096.000	77.466.146.000	82.492.242.000	5.026.096.000	77.466.146.000	82.492.242.000
124	Kab. Bengkulu Utara	20.415.722.000	168.572.010.000	188.987.732.000	20.415.722.000	168.572.010.000	188.987.732.000
125	Kab. Rejang Lebong	6.104.242.000	31.987.019.000	38.091.261.000	6.104.242.000	31.987.019.000	38.091.261.000
126	Kota Bengkulu	28.547.560.000	21.006.492.000	49.554.052.000	28.547.560.000	21.006.492.000	49.554.052.000
127	Kab. Kaur	6.132.037.000	46.583.653.000	52.715.690.000	6.132.037.000	46.583.653.000	52.715.690.000
128	Kab. Seluma	8.561.948.000	82.771.772.000	91.333.720.000	8.561.948.000	82.771.772.000	91.333.720.000
129	Kab. Mukomuko	16.095.196.000	36.649.093.000	52.744.289.000	16.095.196.000	36.595.416.300	52.690.612.300
130	Kab. Lebong	6.894.897.000	38.361.082.000	45.255.979.000	6.894.897.000	38.216.941.550	45.111.838.550
131	Kab. Kepahiang	4.411.661.000	20.915.012.000	25.326.673.000	4.411.661.000	20.915.012.000	25.326.673.000
132	Kab. Bengkulu Tengah	9.976.771.000	58.007.784.000	67.984.555.000	9.976.771.000	58.007.784.000	67.984.555.000
133	Provinsi Lampung	124.856.883.000	105.113.363.000	229.970.246.000	124.732.608.000	105.112.035.300	229.844.643.300
134	Kab. Lampung Barat	6.805.621.000	18.781.623.000	25.587.244.000	6.747.317.875	18.781.623.000	25.528.940.875
135	Kab. Lampung Selatan	25.052.500.000	20.737.746.000	45.790.246.000	24.882.665.000	20.737.746.000	45.620.411.000
136	Kab. Lampung Tengah	35.645.699.000	24.085.060.000	59.730.759.000	35.458.519.000	24.085.060.000	59.543.579.000
137	Kab. Lampung Utara	12.207.041.000	15.201.339.000	27.408.380.000	12.121.998.655	15.201.339.000	27.323.337.655
138	Kab. Lampung Timur	43.360.604.000	63.271.851.000	106.632.455.000	42.629.700.080	63.271.851.000	105.901.551.080

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Tahun 2023					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(8)=(6)+(7)
139	Kab. Tanggamus	36.325.596.000	76.083.077.000	112.408.673.000	36.227.140.125	76.083.077.000	112.310.217.125
140	Kab. Tulang Bawang	20.354.703.000	22.859.815.000	43.214.518.000	20.198.703.000	22.859.815.000	43.058.518.000
141	Kab. Way Kanan	17.653.710.000	21.166.373.000	38.820.083.000	17.640.476.850	21.166.373.000	38.806.849.850
142	Kota Bandar Lampung	68.247.146.000	15.866.961.000	84.114.107.000	68.216.643.425	15.866.961.000	84.083.604.425
143	Kota Metro	11.858.636.000	16.276.437.000	28.135.073.000	11.705.304.000	16.276.437.000	27.981.741.000
144	Kab. Pesawaran	9.505.657.000	18.657.114.000	28.162.771.000	9.486.954.400	18.657.114.000	28.144.068.400
145	Kab. Pringsewu	9.186.299.000	18.225.760.000	27.412.059.000	9.179.311.100	18.225.760.000	27.405.071.100
146	Kab. Mesuji	17.699.486.000	21.400.502.000	39.099.988.000	17.657.714.600	21.400.502.000	39.058.216.600
147	Kab. Tulang Bawang Barat	8.360.652.000	16.383.429.000	24.744.081.000	8.348.936.550	16.383.429.000	24.732.365.550
148	Kab. Pesisir Barat	5.919.455.000	21.440.499.000	27.359.954.000	5.835.356.720	21.440.499.000	27.275.855.720
149	Provinsi DKI Jakarta	20.923.231.238.000	105.830.014.000	21.029.061.252.000	20.923.231.238.000	105.830.014.000	21.029.061.252.000
150	Provinsi Jawa Barat	1.983.937.228.000	502.979.642.000	2.486.916.870.000	1.983.937.228.000	502.979.642.000	2.486.916.870.000
151	Kab. Bandung	205.191.609.000	411.510.858.000	616.702.467.000	205.191.609.000	411.510.858.000	616.702.467.000
152	Kab. Bekasi	564.961.289.000	43.349.838.000	608.311.127.000	564.961.289.000	43.349.838.000	608.311.127.000
153	Kab. Bogor	254.557.034.000	163.053.473.000	417.610.507.000	254.557.034.000	163.053.473.000	417.610.507.000
154	Kab. Ciamis	51.173.536.000	25.020.754.000	76.194.290.000	51.173.536.000	25.020.754.000	76.194.290.000
155	Kab. Cianjur	65.196.338.000	57.998.950.000	123.195.288.000	65.196.338.000	57.998.950.000	123.195.288.000
156	Kab. Cirebon	78.440.332.000	25.531.741.000	103.972.073.000	78.440.332.000	25.531.741.000	103.972.073.000
157	Kab. Garut	133.057.103.000	177.007.050.000	310.064.153.000	133.057.103.000	177.007.050.000	310.064.153.000
158	Kab. Indramayu	157.225.777.000	73.344.309.000	230.570.086.000	157.225.777.000	73.344.309.000	230.570.086.000
159	Kab. Karawang	487.502.788.000	49.504.220.000	537.007.008.000	476.545.273.750	49.504.220.000	526.049.493.750
160	Kab. Kuningan	50.621.337.000	23.565.671.000	74.187.008.000	50.621.337.000	23.565.671.000	74.187.008.000
161	Kab. Majalengka	85.346.804.000	26.667.931.000	112.014.735.000	85.346.804.000	26.667.931.000	112.014.735.000
162	Kab. Purwakarta	99.125.266.000	29.852.607.000	128.977.873.000	99.125.266.000	29.852.607.000	128.977.873.000
163	Kab. Subang	153.287.314.000	77.361.102.000	230.648.416.000	153.287.314.000	77.361.102.000	230.648.416.000
164	Kab. Sukabumi	104.816.872.000	153.048.740.000	257.865.612.000	104.816.872.000	153.048.740.000	257.865.612.000
165	Kab. Sumedang	86.248.819.000	48.509.231.000	134.758.050.000	86.248.819.000	48.509.231.000	134.758.050.000
166	Kab. Tasikmalaya	56.382.715.000	35.604.294.000	91.987.009.000	56.382.715.000	35.604.294.000	91.987.009.000
167	Kota Bandung	479.879.508.000	48.340.024.000	528.219.532.000	479.879.508.000	48.340.024.000	528.219.532.000
168	Kota Bekasi	178.465.247.000	28.719.688.000	207.184.935.000	178.465.247.000	28.719.688.000	207.184.935.000
169	Kota Bogor	91.358.022.000	26.654.508.000	118.012.530.000	91.358.022.000	26.654.508.000	118.012.530.000
170	Kota Cirebon	63.204.296.000	23.016.978.000	86.221.274.000	62.969.231.060	23.016.978.000	85.986.209.060
171	Kota Depok	122.954.122.000	26.473.714.000	149.427.836.000	122.354.000.725	26.473.714.000	148.827.714.725
172	Kota Sukabumi	52.750.901.000	29.509.727.000	82.260.628.000	52.750.901.000	29.509.727.000	82.260.628.000
173	Kota Tasikmalaya	56.566.292.000	24.059.601.000	80.625.893.000	56.331.715.340	24.059.601.000	80.391.316.340
174	Kota Cimahi	63.641.394.000	38.980.202.000	102.621.596.000	63.641.394.000	38.980.202.000	102.621.596.000
175	Kota Banjar	47.237.730.000	23.674.211.000	70.911.941.000	47.237.730.000	23.674.211.000	70.911.941.000
176	Kab. Bandung Barat	76.894.818.000	43.728.560.000	120.623.378.000	76.894.818.000	43.728.560.000	120.623.378.000
177	Kab. Pangandaran	48.636.151.000	27.279.176.000	75.915.327.000	48.636.151.000	27.279.176.000	75.915.327.000
178	Provinsi Jawa Tengah	964.684.633.000	10.181.495.000	974.866.128.000	964.684.633.000	10.181.495.000	974.866.128.000
179	Kab. Banjarnegara	38.151.417.000	1.782.721.000	39.934.138.000	38.151.417.000	1.782.721.000	39.934.138.000
180	Kab. Banyumas	51.265.119.000	2.071.205.000	53.336.324.000	51.265.119.000	2.071.205.000	53.336.324.000
181	Kab. Batang	46.243.016.000	2.564.344.000	48.807.360.000	46.243.016.000	2.564.344.000	48.807.360.000
182	Kab. Blora	118.105.883.000	178.304.216.000	296.410.099.000	118.105.883.000	178.304.216.000	296.410.099.000
183	Kab. Boyolali	57.550.326.000	1.904.000.000	59.454.326.000	57.550.326.000	1.904.000.000	59.454.326.000
184	Kab. Brebes	40.581.156.000	2.378.037.000	42.959.193.000	40.581.156.000	2.378.037.000	42.959.193.000
185	Kab. Cilacap	59.561.142.000	3.927.017.000	63.488.159.000	59.561.142.000	3.927.017.000	63.488.159.000
186	Kab. Demak	69.248.644.000	2.002.400.000	71.251.044.000	69.248.644.000	2.002.400.000	71.251.044.000
187	Kab. Grobogan	57.479.726.000	4.480.289.000	61.960.015.000	57.479.726.000	4.480.289.000	61.960.015.000
188	Kab. Jepara	55.735.868.000	3.807.428.000	59.543.296.000	55.735.868.000	3.807.428.000	59.543.296.000
189	Kab. Karanganyar	52.902.898.000	1.709.643.000	54.612.541.000	52.902.898.000	1.709.643.000	54.612.541.000
190	Kab. Kebumen	36.041.264.000	2.125.033.000	38.166.297.000	36.041.264.000	2.125.033.000	38.166.297.000
191	Kab. Kendal	55.529.273.000	2.615.671.000	58.144.944.000	55.529.273.000	2.615.671.000	58.144.944.000
192	Kab. Klaten	50.713.922.000	1.647.942.000	52.361.864.000	50.713.922.000	1.647.942.000	52.361.864.000
193	Kab. Kudus	341.094.608.000	1.783.041.000	342.877.649.000	341.094.608.000	1.783.041.000	342.877.649.000
194	Kab. Magelang	43.148.907.000	1.834.416.000	44.983.323.000	43.148.907.000	1.834.416.000	44.983.323.000
195	Kab. Pati	42.367.612.000	3.983.057.000	46.350.669.000	42.367.612.000	3.983.057.000	46.350.669.000
196	Kab. Pekalongan	27.893.398.000	1.994.081.000	29.887.479.000	27.893.398.000	1.994.081.000	29.887.479.000
197	Kab. Pemalang	31.037.543.000	3.133.796.000	34.171.339.000	31.037.543.000	3.133.796.000	34.171.339.000
198	Kab. Purbalingga	32.708.303.000	1.778.898.000	34.487.201.000	32.708.303.000	1.778.898.000	34.487.201.000
199	Kab. Purworejo	31.193.340.000	1.790.295.000	32.983.635.000	31.193.340.000	1.790.295.000	32.983.635.000
200	Kab. Rembang	64.530.706.000	5.861.691.000	70.392.397.000	64.530.706.000	5.861.691.000	70.392.397.000
201	Kab. Semarang	45.816.881.000	2.274.182.000	48.091.063.000	45.816.881.000	2.274.182.000	48.091.063.000
202	Kab. Sragen	33.133.095.000	1.878.382.000	35.011.477.000	33.133.095.000	1.878.382.000	35.011.477.000
203	Kab. Sukoharjo	43.574.785.000	1.625.564.000	45.200.349.000	43.574.785.000	1.625.564.000	45.200.349.000
204	Kab. Tegal	39.098.850.000	2.473.742.000	41.572.592.000	39.098.850.000	2.473.742.000	41.572.592.000
205	Kab. Temanggung	72.880.121.000	1.908.720.000	74.788.841.000	72.880.121.000	1.908.720.000	74.788.841.000
206	Kab. Wonogiri	44.839.188.000	1.842.883.000	46.682.071.000	44.839.188.000	1.842.883.000	46.682.071.000
207	Kab. Wonosobo	36.991.823.000	1.897.059.000	38.888.882.000	36.991.823.000	1.897.059.000	38.888.882.000
208	Kota Magelang	32.442.193.000	1.606.836.000	34.049.029.000	32.442.193.000	1.606.836.000	34.049.029.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Tahun 2023					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(8)=(6)+(7)
209	Kota Pekalongan	33.102.950.000	1.707.380.000	34.810.330.000	33.102.950.000	1.707.380.000	34.810.330.000
210	Kota Salatiga	31.230.717.000	1.628.787.000	32.859.504.000	31.230.717.000	1.628.787.000	32.859.504.000
211	Kota Semarang	213.191.661.000	1.893.941.000	215.085.602.000	213.191.661.000	1.893.941.000	215.085.602.000
212	Kota Surakarta	66.395.010.000	1.606.857.000	68.001.867.000	66.395.010.000	1.606.857.000	68.001.867.000
213	Kota Tegal	33.243.281.000	1.731.665.000	34.974.946.000	33.243.281.000	1.731.665.000	34.974.946.000
214	Provinsi DI Yogyakarta	122.536.869.000	118.868.000	122.655.737.000	122.536.869.000	118.868.000	122.655.737.000
215	Kab. Bantul	38.259.989.000	1.354.676.000	39.614.665.000	38.259.989.000	1.354.676.000	39.614.665.000
216	Kab. Gunung Kidul	19.536.537.000	1.844.566.000	21.381.103.000	19.536.537.000	1.844.566.000	21.381.103.000
217	Kab. Kulon Progo	19.032.328.000	1.416.309.000	20.448.637.000	19.032.328.000	1.416.309.000	20.448.637.000
218	Kab. Sleman	72.915.801.000	1.312.042.000	74.227.843.000	72.915.801.000	1.312.042.000	74.227.843.000
219	Kota Yogyakarta	58.154.602.000	1.282.725.000	59.437.327.000	58.116.229.930	1.282.725.000	59.398.954.930
220	Provinsi Jawa Timur	2.200.466.150.000	1.178.315.111.000	3.378.781.261.000	2.138.970.972.500	1.178.315.111.000	3.317.286.083.500
221	Kab. Bangkalan	54.630.428.000	49.822.394.000	104.452.822.000	53.754.335.150	49.822.394.000	103.576.729.150
222	Kab. Banyuwangi	101.079.483.000	115.314.388.000	216.393.871.000	101.079.483.000	115.314.388.000	216.393.871.000
223	Kab. Blitar	61.249.227.000	51.958.589.000	113.207.816.000	61.249.227.000	51.958.589.000	113.207.816.000
224	Kab. Bojonegoro	1.298.342.893.000	3.114.186.207.000	4.412.529.100.000	1.295.819.447.830	3.114.186.207.000	4.410.005.654.830
225	Kab. Bondowoso	91.430.483.000	58.901.354.000	150.331.837.000	91.430.483.000	58.901.354.000	150.331.837.000
226	Kab. Gresik	161.704.862.000	74.095.155.000	235.800.017.000	161.704.862.000	74.095.155.000	235.800.017.000
227	Kab. Jember	165.454.483.000	58.296.089.000	223.750.572.000	165.454.483.000	58.296.089.000	223.750.572.000
228	Kab. Jombang	95.955.910.000	207.184.813.000	303.140.723.000	94.273.082.830	207.184.813.000	301.457.895.830
229	Kab. Kediri	127.867.496.000	50.051.277.000	177.918.773.000	125.169.467.960	50.051.277.000	175.220.744.960
230	Kab. Lamongan	105.152.247.000	206.706.411.000	311.858.658.000	105.152.247.000	206.706.411.000	311.858.658.000
231	Kab. Lumajang	61.800.222.000	51.238.118.000	113.038.340.000	61.800.222.000	51.238.118.000	113.038.340.000
232	Kab. Madiun	55.631.738.000	214.973.399.000	270.605.137.000	55.631.738.000	214.973.399.000	270.605.137.000
233	Kab. Magetan	54.718.993.000	50.655.520.000	105.374.513.000	53.802.478.390	50.655.520.000	104.457.998.390
234	Kab. Malang	187.433.391.000	51.491.621.000	238.925.012.000	187.433.391.000	51.491.621.000	238.925.012.000
235	Kab. Mojokerto	71.472.406.000	53.212.981.000	124.685.387.000	71.472.406.000	53.212.981.000	124.685.387.000
236	Kab. Nganjuk	64.490.235.000	213.923.733.000	278.413.968.000	64.490.235.000	213.923.733.000	278.413.968.000
237	Kab. Ngawi	72.872.329.000	212.547.479.000	285.419.808.000	72.872.329.000	212.547.479.000	285.419.808.000
238	Kab. Pacitan	52.663.056.000	49.559.664.000	102.222.720.000	52.663.056.000	49.559.664.000	102.222.720.000
239	Kab. Pamekasan	139.833.495.000	49.975.826.000	189.809.321.000	139.833.495.000	49.975.826.000	189.809.321.000
240	Kab. Pasuruan	434.726.345.000	50.131.395.000	484.857.740.000	434.726.345.000	50.131.395.000	484.857.740.000
241	Kab. Ponorogo	64.210.949.000	51.832.353.000	116.043.302.000	64.210.949.000	51.832.353.000	116.043.302.000
242	Kab. Probolinggo	123.646.043.000	49.853.821.000	173.499.864.000	123.646.043.000	49.853.821.000	173.499.864.000
243	Kab. Sampang	59.416.468.000	50.405.793.000	109.822.261.000	59.416.468.000	50.405.793.000	109.822.261.000
244	Kab. Sidoarjo	202.135.167.000	52.119.326.000	254.254.493.000	202.135.167.000	52.119.326.000	254.254.493.000
245	Kab. Situbondo	95.264.993.000	57.322.625.000	152.587.618.000	95.264.993.000	57.322.625.000	152.587.618.000
246	Kab. Sumenep	90.581.830.000	50.457.412.000	141.039.242.000	90.581.830.000	50.457.412.000	141.039.242.000
247	Kab. Trenggalek	54.542.117.000	53.662.380.000	108.204.497.000	54.542.117.000	53.662.380.000	108.204.497.000
248	Kab. Tuban	115.766.344.000	589.522.879.000	705.289.223.000	115.766.344.000	589.522.879.000	705.289.223.000
249	Kab. Tulungagung	71.078.968.000	50.226.953.000	121.305.921.000	71.078.968.000	50.226.953.000	121.305.921.000
250	Kota Blitar	55.597.760.000	49.770.631.000	105.368.391.000	55.597.760.000	49.770.631.000	105.368.391.000
251	Kota Kediri	216.320.097.000	49.734.945.000	266.055.042.000	216.320.097.000	49.734.945.000	266.055.042.000
252	Kota Madiun	61.670.223.000	49.084.431.000	110.754.654.000	60.781.985.730	49.084.431.000	109.866.416.730
253	Kota Malang	131.184.635.000	48.997.561.000	180.182.196.000	131.184.635.000	48.997.561.000	180.182.196.000
254	Kota Mojokerto	58.377.109.000	48.988.706.000	107.365.815.000	57.398.184.910	48.988.706.000	106.386.890.910
255	Kota Pasuruan	53.677.360.000	49.021.872.000	102.699.232.000	52.793.184.790	49.021.872.000	101.815.056.790
256	Kota Probolinggo	58.044.871.000	49.016.372.000	107.061.243.000	57.026.844.430	49.016.372.000	106.043.216.430
257	Kota Surabaya	600.638.527.000	70.111.232.000	670.749.759.000	600.638.527.000	70.111.232.000	670.749.759.000
258	Kota Batu	51.113.113.000	49.074.734.000	100.187.847.000	50.239.791.580	49.074.734.000	99.314.525.580
259	Provinsi Kalimantan Barat	172.698.431.000	347.513.815.000	520.212.246.000	172.686.711.020	347.513.815.000	520.200.526.020
260	Kab. Bengkayang	21.288.081.000	60.022.214.000	81.310.295.000	21.288.081.000	60.022.214.000	81.310.295.000
261	Kab. Landak	23.243.703.000	53.208.664.000	76.452.367.000	23.241.824.850	52.660.046.700	75.901.871.550
262	Kab. Kapuas Hulu	25.615.217.000	95.186.870.000	120.802.087.000	25.613.336.825	95.186.870.000	120.800.206.825
263	Kab. Ketapang	149.542.506.000	309.754.519.000	459.297.025.000	149.540.627.850	309.754.519.000	459.295.146.850
264	Kab. Mempawah	15.077.861.000	32.668.802.000	47.746.663.000	15.076.734.110	32.668.802.000	47.745.536.110
265	Kab. Sambas	25.815.082.000	36.839.325.000	62.654.407.000	25.813.203.850	36.839.325.000	62.652.528.850
266	Kab. Sanggau	69.150.195.000	305.519.005.000	374.669.200.000	69.148.316.850	305.519.005.000	374.667.321.850
267	Kab. Sintang	42.025.898.000	127.827.370.000	169.853.268.000	42.024.019.850	127.827.370.000	169.851.389.850
268	Kota Pontianak	64.351.816.000	36.765.296.000	101.117.112.000	64.349.903.200	36.765.296.000	101.115.199.200
269	Kota Singkawang	13.650.133.000	29.586.546.000	43.236.679.000	13.649.006.110	29.586.546.000	43.235.552.110
270	Kab. Sekadau	25.323.209.000	64.556.368.000	89.879.577.000	25.322.082.110	64.556.368.000	89.878.450.110
271	Kab. Melawi	18.279.648.000	50.781.681.000	69.061.329.000	18.277.769.850	50.781.681.000	69.059.450.850
272	Kab. Kayong Utara	14.678.053.000	45.006.850.000	59.684.903.000	14.678.053.000	45.006.850.000	59.684.903.000
273	Kab. Kubu Raya	39.170.447.000	64.359.993.000	103.530.440.000	39.168.568.850	64.359.993.000	103.528.561.850
274	Provinsi Kalimantan Tengah	252.704.792.000	2.665.896.636.000	2.918.601.428.000	252.704.772.000	2.665.896.636.000	2.918.601.408.000
275	Kab. Barito Selatan	14.309.402.000	707.244.524.000	721.553.926.000	14.309.400.000	704.205.745.600	718.515.145.600
276	Kab. Barito Utara	142.480.701.000	2.151.628.866.000	2.294.109.567.000	142.480.699.000	2.140.244.460.800	2.282.725.159.800
277	Kab. Kapuas	201.625.999.000	1.518.751.240.000	1.720.377.239.000	201.625.997.000	1.518.751.240.000	1.720.377.237.000
278	Kab. Kotawaringin Barat	58.296.342.000	314.257.850.000	372.554.192.000	58.296.340.000	314.257.850.000	372.554.190.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Tahun 2023					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(8)=(6)+(7)
279	Kab. Kotawaringin Timur	116.534.608.000	474.449.558.000	590.984.166.000	116.534.577.000	474.449.558.000	590.984.135.000
280	Kota Palangkaraya	33.745.954.000	286.940.208.000	320.686.162.000	33.745.952.000	281.908.736.700	315.654.688.700
281	Kab. Katingan	34.940.026.000	309.578.580.000	344.518.606.000	34.940.024.000	309.578.580.000	344.518.604.000
282	Kab. Seruyan	75.709.222.000	335.385.279.000	411.094.501.000	75.709.220.000	335.385.279.000	411.094.499.000
283	Kab. Sukamara	17.122.669.000	292.431.422.000	309.554.091.000	17.122.667.000	292.431.422.000	309.554.089.000
284	Kab. Lamandau	30.198.512.000	306.970.128.000	337.168.640.000	30.198.510.340	306.970.128.000	337.168.638.340
285	Kab. Gunung Mas	30.500.626.000	464.899.487.000	495.400.113.000	30.500.624.000	464.899.487.000	495.400.111.000
286	Kab. Pulang Pisau	25.975.149.000	342.333.117.000	368.308.266.000	25.975.147.000	342.333.117.000	368.308.264.000
287	Kab. Murung Raya	134.052.373.000	1.732.067.459.000	1.866.119.832.000	134.052.371.000	1.720.435.840.400	1.854.488.211.400
288	Kab. Barito Timur	28.255.638.000	333.680.223.000	361.935.861.000	28.255.636.000	333.680.223.000	361.935.859.000
289	Provinsi Kalimantan Selatan	285.579.718.000	3.495.415.623.000	3.780.995.341.000	285.576.009.000	3.495.415.623.000	3.780.991.632.000
290	Kab. Banjar	54.756.883.000	863.810.079.000	918.566.962.000	54.756.496.000	863.810.079.000	918.566.575.000
291	Kab. Barito Kuala	20.550.624.000	506.161.243.000	526.711.867.000	20.550.237.000	506.161.243.000	526.711.480.000
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	56.773.877.000	462.474.942.000	519.248.819.000	56.773.490.000	462.474.942.000	519.248.432.000
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	13.899.698.000	534.723.790.000	548.623.488.000	13.899.311.000	534.723.790.000	548.623.101.000
294	Kab. Hulu Sungai Utara	13.970.787.000	571.401.589.000	585.372.376.000	13.970.400.000	571.232.259.650	585.202.659.650
295	Kab. Kotabaru	88.355.705.000	1.776.568.660.000	1.864.924.365.000	88.355.318.000	1.776.568.660.000	1.864.923.978.000
296	Kab. Tabalong	70.656.402.000	1.243.742.405.000	1.314.398.807.000	70.656.015.000	1.242.608.167.000	1.313.264.182.000
297	Kab. Tanah Laut	112.995.303.000	816.425.371.000	929.420.674.000	112.994.916.000	816.425.371.000	929.420.287.000
298	Kab. Tapin	101.220.167.000	1.000.072.494.000	1.101.292.661.000	101.219.780.000	1.000.072.494.000	1.101.292.274.000
299	Kota Banjarbaru	31.448.143.000	435.099.526.000	466.547.669.000	31.447.756.000	435.099.526.000	466.547.282.000
300	Kota Banjarmasin	69.380.293.000	383.043.855.000	452.424.148.000	69.375.670.730	383.043.855.000	452.419.525.730
301	Kab. Balangan	79.307.936.000	2.449.767.855.000	2.529.075.791.000	79.307.614.790	2.449.767.855.000	2.529.075.469.790
302	Kab. Tanah Bumbu	243.003.377.000	2.969.743.294.000	3.212.746.671.000	243.002.990.000	2.969.743.294.000	3.212.746.284.000
303	Provinsi Kalimantan Timur	842.798.210.000	8.188.057.051.000	9.030.855.261.000	842.796.171.000	8.188.057.051.000	9.030.853.222.000
304	Kab. Berau	126.751.941.000	3.373.405.286.000	3.500.157.227.000	126.751.658.000	3.373.405.286.000	3.500.156.944.000
305	Kab. Kutai Kartanegara	1.116.981.569.000	7.710.058.895.000	8.827.040.464.000	1.116.981.286.000	7.710.058.895.000	8.827.040.181.000
306	Kab. Kutai Barat	270.987.796.000	3.114.883.768.000	3.385.871.564.000	270.987.774.775	3.114.883.768.000	3.385.871.542.775
307	Kab. Kutai Timur	831.286.171.000	6.036.358.767.000	6.867.644.938.000	831.285.888.000	6.036.358.767.000	6.867.644.655.000
308	Kab. Paser	104.057.148.000	2.411.608.498.000	2.515.665.646.000	104.056.865.000	2.411.608.498.000	2.515.665.363.000
309	Kota Balikpapan	169.861.010.000	1.466.910.821.000	1.636.771.831.000	169.860.711.000	1.466.910.821.000	1.636.771.532.000
310	Kota Bontang	168.236.068.000	1.692.449.530.000	1.860.685.598.000	168.235.785.000	1.692.449.530.000	1.860.685.315.000
311	Kota Samarinda	144.968.171.000	1.468.868.906.000	1.613.837.077.000	144.965.646.140	1.468.868.906.000	1.613.834.552.140
312	Kab. Penajam Paser Utara	86.151.543.000	1.540.022.212.000	1.626.173.755.000	86.151.260.000	1.533.882.026.200	1.620.033.286.200
313	Kab. Mahakam Ulu	45.139.923.000	1.832.220.050.000	1.877.359.973.000	45.139.640.000	1.832.220.050.000	1.877.359.690.000
314	Provinsi Sulawesi Utara	85.120.827.000	68.789.423.000	153.910.250.000	85.120.827.000	68.789.423.000	153.910.250.000
315	Kab. Bolaang Mongondow	14.513.374.000	35.128.323.000	49.641.697.000	14.513.374.000	35.128.323.000	49.641.697.000
316	Kab. Minahasa	15.788.184.000	40.055.962.000	55.844.146.000	15.788.184.000	40.055.962.000	55.844.146.000
317	Kab. Sangihe	6.432.063.000	9.997.480.000	16.429.543.000	6.432.063.000	9.997.480.000	16.429.543.000
318	Kota Bitung	22.089.437.000	34.094.994.000	56.184.431.000	22.089.437.000	34.094.994.000	56.184.431.000
319	Kota Manado	44.985.041.000	11.066.125.000	56.051.166.000	44.985.041.000	11.066.125.000	56.051.166.000
320	Kab. Kepulauan Talaud	4.804.044.000	9.022.594.000	13.826.638.000	4.804.044.000	9.022.594.000	13.826.638.000
321	Kab. Minahasa Selatan	6.650.374.000	13.204.004.000	19.854.378.000	6.650.374.000	13.198.298.800	19.848.672.800
322	Kota Tomohon	13.346.030.000	33.214.930.000	46.560.960.000	13.346.030.000	33.214.930.000	46.560.960.000
323	Kab. Minahasa Utara	26.891.426.000	42.633.623.000	69.525.049.000	26.891.426.000	42.633.623.000	69.525.049.000
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	3.897.764.000	8.044.511.000	11.942.275.000	3.897.764.000	8.044.511.000	11.942.275.000
325	Kota Kotamobagu	7.878.536.000	8.405.683.000	16.284.219.000	7.878.536.000	8.400.004.150	16.278.540.150
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	3.974.131.000	10.939.518.000	14.913.649.000	3.974.131.000	10.917.398.450	14.891.529.450
327	Kab. Minahasa Tenggara	5.445.954.000	8.274.263.000	13.720.217.000	5.445.954.000	8.274.263.000	13.720.217.000
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	4.499.473.000	10.321.963.000	14.821.436.000	4.499.473.000	10.321.963.000	14.821.436.000
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	12.214.973.000	17.510.596.000	29.725.569.000	12.214.973.000	17.510.596.000	29.725.569.000
330	Provinsi Sulawesi Tengah	205.089.030.000	787.644.571.000	992.733.601.000	205.076.631.600	787.644.571.000	992.721.202.600
331	Kab. Banggai	284.628.267.000	989.024.381.000	1.273.652.648.000	284.621.327.925	989.024.381.000	1.273.645.708.925
332	Kab. Banggai Kepulauan	9.008.927.000	105.269.121.000	114.278.048.000	9.007.635.500	105.269.121.000	114.276.756.500
333	Kab. Buol	13.177.986.000	105.827.121.000	119.005.107.000	13.160.766.000	105.519.356.400	118.680.122.400
334	Kab. Tolitoli	11.310.284.000	104.790.352.000	116.100.636.000	11.308.992.500	104.790.352.000	116.099.344.500
335	Kab. Donggala	11.200.263.000	112.187.393.000	123.387.656.000	11.183.043.000	112.040.256.300	123.223.299.300
336	Kab. Morowali	153.981.219.000	849.895.002.000	1.003.876.221.000	153.963.999.000	849.171.628.200	1.003.135.627.200
337	Kab. Poso	12.179.223.000	126.167.035.000	138.346.258.000	12.172.765.500	126.167.035.000	138.339.800.500
338	Kota Palu	29.900.425.000	113.720.481.000	143.620.906.000	29.891.040.100	113.720.481.000	143.611.521.100
339	Kab. Parigi Moutong	12.077.584.000	109.843.214.000	121.920.798.000	12.064.633.975	109.843.214.000	121.907.847.975
340	Kab. Tojo Una Una	9.077.934.000	193.657.741.000	202.735.675.000	9.076.642.500	193.657.741.000	202.734.383.500
341	Kab. Sigi	8.842.696.000	103.973.368.000	112.816.064.000	8.825.476.000	103.973.368.000	112.798.844.000
342	Kab. Banggai Laut	8.416.327.000	108.149.222.000	116.565.549.000	8.415.035.500	108.149.222.000	116.564.257.500
343	Kab. Morowali Utara	33.439.301.000	412.476.119.000	445.915.420.000	33.422.081.000	412.476.119.000	445.898.200.000
344	Provinsi Sulawesi Selatan	244.022.055.000	131.581.308.000	375.603.363.000	244.022.055.000	130.471.332.000	374.493.387.000
345	Kab. Bantaeng	8.281.273.000	4.567.359.000	12.848.632.000	8.281.273.000	4.567.359.000	12.848.632.000
346	Kab. Barru	7.621.059.000	5.973.734.000	13.594.793.000	7.621.059.000	5.973.734.000	13.594.793.000
347	Kab. Bone	17.425.922.000	7.527.953.000	24.953.875.000	17.425.922.000	7.527.953.000	24.953.875.000
348	Kab. Bulukumba	11.496.584.000	5.110.280.000	16.606.864.000	11.496.584.000	5.110.280.000	16.606.864.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Tahun 2023					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(8)=(6)+(7)
349	Kab. Enrekang	7.299.099.000	7.027.690.000	14.326.789.000	7.299.099.000	7.027.690.000	14.326.789.000
350	Kab. Gowa	14.216.827.000	4.558.391.000	18.775.218.000	14.216.827.000	4.558.391.000	18.775.218.000
351	Kab. Jeneponto	8.204.498.000	4.768.983.000	12.973.481.000	8.204.498.000	4.768.983.000	12.973.481.000
352	Kab. Luwu	8.413.023.000	8.944.071.000	17.357.094.000	8.413.023.000	8.944.071.000	17.357.094.000
353	Kab. Luwu Utara	9.308.864.000	23.861.971.000	33.170.835.000	9.308.864.000	23.861.971.000	33.170.835.000
354	Kab. Maros	15.030.037.000	4.670.703.000	19.700.740.000	15.030.037.000	4.670.703.000	19.700.740.000
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	17.846.635.000	13.527.885.000	31.374.520.000	17.846.635.000	13.482.328.400	31.328.963.400
356	Kota Palopo	12.074.931.000	7.185.435.000	19.260.366.000	12.074.931.000	7.185.435.000	19.260.366.000
357	Kab. Luwu Timur	51.301.128.000	291.022.809.000	342.323.937.000	51.301.128.000	290.525.723.050	341.826.851.050
358	Kab. Pinrang	7.956.612.000	7.475.408.000	15.432.020.000	7.956.612.000	7.475.408.000	15.432.020.000
359	Kab. Sinjai	9.790.204.000	4.930.829.000	14.721.033.000	9.790.204.000	4.930.829.000	14.721.033.000
360	Kab. Kepulauan Selayar	7.267.343.000	11.317.026.000	18.584.369.000	7.267.343.000	11.317.026.000	18.584.369.000
361	Kab. Sidenreng Rappang	8.531.326.000	8.078.962.000	16.610.288.000	8.531.326.000	8.058.941.100	16.590.267.100
362	Kab. Soppeng	12.573.937.000	9.010.887.000	21.584.824.000	12.573.937.000	9.010.887.000	21.584.824.000
363	Kab. Takalar	10.473.515.000	5.201.268.000	15.674.783.000	10.473.515.000	5.201.268.000	15.674.783.000
364	Kab. Tana Toraja	7.868.179.000	5.849.295.000	13.717.474.000	7.868.179.000	5.849.295.000	13.717.474.000
365	Kab. Wajo	29.458.026.000	17.411.471.000	46.869.497.000	29.458.026.000	17.411.471.000	46.869.497.000
366	Kota Parepare	10.516.249.000	5.368.610.000	15.884.859.000	10.508.046.160	5.368.610.000	15.876.656.160
367	Kota Makassar	163.266.117.000	7.206.556.000	170.472.673.000	163.266.117.000	7.206.556.000	170.472.673.000
368	Kab. Toraja Utara	7.397.091.000	6.102.467.000	13.499.558.000	7.397.091.000	6.102.467.000	13.499.558.000
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	76.922.287.000	991.368.225.000	1.068.290.512.000	76.922.206.000	991.368.225.000	1.068.290.431.000
370	Kab. Buton	5.031.227.000	65.724.163.000	70.755.390.000	5.031.220.000	65.724.163.000	70.755.383.000
371	Kab. Konawe	10.465.410.000	280.779.290.000	291.244.700.000	10.465.403.000	280.323.522.100	290.788.925.100
372	Kab. Kolaka	39.530.715.000	549.589.440.000	589.120.155.000	39.530.708.000	549.589.440.000	589.120.148.000
373	Kab. Muna	5.026.274.000	70.928.559.000	75.954.833.000	5.026.267.000	70.781.231.050	75.807.498.050
374	Kota Kendari	33.375.650.000	83.315.884.000	116.691.534.000	33.375.521.000	83.315.884.000	116.691.405.000
375	Kota Bau-bau	6.021.878.000	63.282.032.000	69.303.910.000	6.021.871.000	63.282.032.000	69.303.903.000
376	Kab. Konawe Selatan	20.391.759.000	313.765.640.000	334.157.399.000	20.391.752.000	313.765.640.000	334.157.392.000
377	Kab. Bombana	15.745.403.000	303.166.534.000	318.911.937.000	15.745.396.000	303.166.534.000	318.911.930.000
378	Kab. Wakatobi	3.570.420.000	65.966.000.000	69.536.420.000	3.570.413.000	65.966.000.000	69.536.413.000
379	Kab. Kolaka Utara	6.071.879.000	242.777.648.000	248.849.527.000	6.071.875.185	242.777.648.000	248.849.523.185
380	Kab. Konawe Utara	47.853.406.000	1.242.635.330.000	1.290.488.736.000	47.853.399.000	1.242.267.839.300	1.290.121.238.300
381	Kab. Buton Utara	3.344.781.000	66.476.101.000	69.820.882.000	3.344.774.000	66.368.837.800	69.713.611.800
382	Kab. Konawe Kepulauan	3.311.262.000	67.274.424.000	70.585.686.000	3.311.255.000	67.274.424.000	70.585.679.000
383	Kab. Kolaka Timur	3.905.171.000	127.780.503.000	131.685.674.000	3.905.164.000	127.547.443.200	131.452.607.200
384	Kab. Muna Barat	3.296.775.000	66.701.492.000	69.998.267.000	3.296.768.000	66.701.492.000	69.998.260.000
385	Kab. Buton Tengah	9.385.902.000	106.380.872.000	115.766.774.000	9.385.901.475	106.380.872.000	115.766.773.475
386	Kab. Buton Selatan	3.288.988.000	64.121.529.000	67.410.517.000	3.288.981.000	64.087.439.750	67.376.420.750
387	Provinsi Bali	171.454.090.000	62.000	171.454.152.000	171.355.049.200	62.000	171.355.111.200
388	Kab. Badung	70.266.313.000	1.692.811.000	71.959.124.000	70.222.751.425	1.692.811.000	71.915.562.425
389	Kab. Bangli	12.805.443.000	1.286.756.000	14.092.199.000	12.795.280.110	1.286.756.000	14.082.036.110
390	Kab. Buleleng	23.315.730.000	2.131.709.000	25.447.439.000	23.272.967.625	2.131.709.000	25.404.676.625
391	Kab. Gianyar	21.243.938.000	1.355.733.000	22.599.671.000	21.230.086.970	1.355.733.000	22.585.819.970
392	Kab. Jembrana	17.159.979.000	1.708.595.000	18.868.574.000	17.142.691.845	1.708.595.000	18.851.286.845
393	Kab. Karangasem	14.884.755.000	1.814.694.000	16.699.449.000	14.884.755.000	1.814.694.000	16.699.449.000
394	Kab. Klungkung	13.839.118.000	1.842.525.000	15.681.643.000	13.829.832.925	1.842.525.000	15.672.357.925
395	Kab. Tabanan	19.380.345.000	1.450.887.000	20.831.232.000	19.363.450.500	1.450.887.000	20.814.337.500
396	Kota Denpasar	104.963.533.000	1.342.767.000	106.306.300.000	104.942.077.210	1.342.767.000	106.284.844.210
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	246.770.313.000	387.498.095.000	634.268.408.000	246.770.313.000	387.498.095.000	634.268.408.000
398	Kab. Bima	27.621.993.000	61.101.645.000	88.723.638.000	27.621.993.000	60.986.641.700	88.608.634.700
399	Kab. Dompu	29.023.442.000	59.533.160.000	88.556.602.000	29.023.442.000	59.172.289.950	88.195.731.950
400	Kab. Lombok Barat	32.019.755.000	60.520.191.000	92.539.946.000	32.019.755.000	60.520.191.000	92.539.946.000
401	Kab. Lombok Tengah	89.655.213.000	57.456.750.000	147.111.963.000	89.655.213.000	57.406.759.800	147.061.972.800
402	Kab. Lombok Timur	97.855.562.000	57.745.816.000	155.601.378.000	97.855.562.000	57.745.816.000	155.601.378.000
403	Kab. Sumbawa	35.472.721.000	268.492.544.000	303.965.265.000	35.472.721.000	268.492.544.000	303.965.265.000
404	Kota Mataram	119.552.997.000	56.478.888.000	176.031.885.000	119.552.997.000	56.478.888.000	176.031.885.000
405	Kota Bima	28.635.929.000	56.467.722.000	85.103.651.000	28.635.929.000	56.467.722.000	85.103.651.000
406	Kab. Sumbawa Barat	195.500.911.000	823.765.869.000	1.019.266.780.000	195.500.911.000	823.523.645.900	1.019.024.556.900
407	Kab. Lombok Utara	25.854.540.000	57.704.217.000	83.558.757.000	25.854.540.000	57.704.217.000	83.558.757.000
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	58.329.358.000	1.911.382.000	60.240.740.000	58.329.358.000	1.911.382.000	60.240.740.000
409	Kab. Alor	3.092.490.000	4.541.652.000	7.634.142.000	3.088.328.490	4.541.652.000	7.629.980.490
410	Kab. Belu	3.848.831.000	1.535.200.000	5.384.031.000	3.848.831.000	1.535.200.000	5.384.031.000
411	Kab. Ende	6.575.665.000	4.082.701.000	10.658.366.000	6.571.961.950	4.082.701.000	10.654.662.950
412	Kab. Flores Timur	4.745.581.000	3.339.184.000	8.084.765.000	4.745.581.000	3.339.184.000	8.084.765.000
413	Kab. Kupang	4.660.001.000	3.900.008.000	8.560.009.000	4.660.001.000	3.900.008.000	8.560.009.000
414	Kab. Lembata	2.566.966.000	3.418.817.000	5.985.783.000	2.566.966.000	3.418.817.000	5.985.783.000
415	Kab. Manggarai	6.202.079.000	3.663.309.000	9.865.388.000	6.185.108.570	3.663.309.000	9.848.417.570
416	Kab. Ngada	3.057.983.000	1.958.256.000	5.016.239.000	3.057.983.000	1.958.256.000	5.016.239.000
417	Kab. Sikka	5.866.969.000	3.617.910.000	9.484.879.000	5.856.870.790	3.617.910.000	9.474.780.790
418	Kab. Sumba Barat	3.037.590.000	1.650.192.000	4.687.782.000	3.037.590.000	1.650.192.000	4.687.782.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Tahun 2023					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(8)=(6)+(7)
419	Kab. Sumba Timur	7.164.085.000	3.704.100.000	10.868.185.000	7.164.085.000	3.704.100.000	10.868.185.000
420	Kab. Timor Tengah Selatan	3.577.762.000	1.927.563.000	5.505.325.000	3.577.762.000	1.927.563.000	5.505.325.000
421	Kab. Timor Tengah Utara	3.489.790.000	1.918.686.000	5.408.476.000	3.479.548.900	1.918.686.000	5.398.234.900
422	Kota Kupang	24.327.142.000	1.380.727.000	25.707.869.000	24.327.142.000	1.380.727.000	25.707.869.000
423	Kab. Rote Ndao	2.737.645.000	3.285.182.000	6.022.827.000	2.737.645.000	3.285.182.000	6.022.827.000
424	Kab. Manggarai Barat	4.567.883.000	4.406.916.000	8.974.799.000	4.567.883.000	4.406.916.000	8.974.799.000
425	Kab. Nagekeo	2.701.987.000	2.215.912.000	4.917.899.000	2.701.987.000	2.215.912.000	4.917.899.000
426	Kab. Sumba Barat Daya	3.576.748.000	1.916.738.000	5.493.486.000	3.576.748.000	1.916.738.000	5.493.486.000
427	Kab. Sumba Tengah	2.241.693.000	1.844.046.000	4.085.739.000	2.241.693.000	1.844.046.000	4.085.739.000
428	Kab. Manggarai Timur	3.178.034.000	2.114.520.000	5.292.554.000	3.178.034.000	2.114.520.000	5.292.554.000
429	Kab. Sabu Raijua	2.166.984.000	2.438.534.000	4.605.518.000	2.162.986.680	2.438.534.000	4.601.520.680
430	Kab. Malaka	2.646.506.000	1.648.711.000	4.295.217.000	2.646.506.000	1.648.711.000	4.295.217.000
431	Provinsi Maluku	33.715.181.000	46.526.162.000	80.241.343.000	33.715.181.000	46.526.162.000	80.241.343.000
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	4.530.391.000	11.461.956.000	15.992.347.000	4.530.391.000	10.121.324.950	14.651.715.950
433	Kab. Maluku Tengah	6.941.670.000	24.974.863.000	31.916.533.000	6.941.670.000	24.974.863.000	31.916.533.000
434	Kab. Maluku Tenggara	3.190.735.000	5.941.018.000	9.131.753.000	3.190.735.000	5.941.018.000	9.131.753.000
435	Kab. Buru	4.498.923.000	9.667.593.000	14.166.516.000	4.498.923.000	4.883.951.100	9.382.874.100
436	Kota Ambon	21.199.717.000	4.793.255.000	25.992.972.000	21.199.717.000	4.793.255.000	25.992.972.000
437	Kab. Seram Bagian Barat	3.667.343.000	8.224.163.000	11.891.506.000	3.667.343.000	8.224.163.000	11.891.506.000
438	Kab. Seram Bagian Timur	19.296.490.000	31.636.978.000	50.933.468.000	19.296.490.000	31.636.978.000	50.933.468.000
439	Kab. Kepulauan Aru	3.590.771.000	11.061.439.000	14.652.210.000	3.590.771.000	11.061.439.000	14.652.210.000
440	Kota Tual	2.754.591.000	5.492.301.000	8.246.892.000	2.754.591.000	5.492.301.000	8.246.892.000
441	Kab. Maluku Barat Daya	9.082.473.000	25.278.619.000	34.361.092.000	9.082.473.000	25.278.619.000	34.361.092.000
442	Kab. Buru Selatan	3.909.125.000	10.915.571.000	14.824.696.000	3.909.125.000	10.915.571.000	14.824.696.000
443	Provinsi Papua	124.904.698.000	253.604.475.000	378.509.173.000	124.904.698.000	253.604.475.000	378.509.173.000
444	Kab. Biak Numfor	10.975.940.000	43.433.444.000	54.409.384.000	10.975.940.000	43.433.444.000	54.409.384.000
445	Kab. Jayapura	15.355.458.000	49.542.251.000	64.897.709.000	15.355.458.000	49.542.251.000	64.897.709.000
446	Kab. Jayawijaya	10.383.638.000	40.037.345.000	50.420.983.000	10.383.638.000	40.037.345.000	50.420.983.000
447	Kab. Merauke	36.233.122.000	56.054.792.000	92.287.914.000	36.233.122.000	56.054.792.000	92.287.914.000
448	Kab. Mimika	788.154.700.000	1.822.331.525.000	2.610.486.225.000	788.154.700.000	1.818.908.110.050	2.607.062.810.050
449	Kab. Nabire	14.327.768.000	52.506.979.000	66.834.747.000	14.327.768.000	47.219.524.250	61.547.292.250
450	Kab. Paniai	8.393.692.000	128.598.827.000	136.992.519.000	8.393.692.000	128.598.827.000	136.992.519.000
451	Kab. Puncak Jaya	9.694.478.000	40.032.188.000	49.726.666.000	9.694.478.000	40.032.188.000	49.726.666.000
452	Kab. Kepulauan Yapen	9.537.596.000	44.098.691.000	53.636.287.000	9.537.596.000	44.098.691.000	53.636.287.000
453	Kota Jayapura	83.520.444.000	42.414.330.000	125.934.774.000	83.520.444.000	42.414.330.000	125.934.774.000
454	Kab. Sarmi	12.743.386.000	61.540.562.000	74.283.948.000	12.743.386.000	50.058.490.850	62.801.876.850
455	Kab. Keerom	13.240.318.000	51.381.725.000	64.622.043.000	13.240.318.000	51.381.725.000	64.622.043.000
456	Kab. Yahukimo	10.480.868.000	41.582.919.000	52.063.787.000	10.480.868.000	41.582.919.000	52.063.787.000
457	Kab. Pegunungan Bintang	10.052.735.000	45.909.613.000	55.962.348.000	10.052.735.000	45.909.613.000	55.962.348.000
458	Kab. Tolikara	9.708.444.000	40.038.927.000	49.747.371.000	9.708.444.000	40.038.927.000	49.747.371.000
459	Kab. Boven Digoel	17.391.585.000	48.531.692.000	65.923.277.000	17.391.585.000	48.531.692.000	65.923.277.000
460	Kab. Mappi	10.992.060.000	43.829.381.000	54.821.441.000	10.992.060.000	43.829.381.000	54.821.441.000
461	Kab. Asmat	9.966.853.000	128.098.489.000	138.065.342.000	9.966.853.000	128.098.489.000	138.065.342.000
462	Kab. Waropen	9.594.575.000	42.484.956.000	52.079.531.000	9.594.575.000	41.800.618.450	51.395.193.450
463	Kab. Supiori	8.474.590.000	41.869.051.000	50.343.641.000	8.474.590.000	41.869.051.000	50.343.641.000
464	Kab. Mamberamo Raya	9.988.557.000	43.129.389.000	53.117.946.000	9.988.557.000	41.397.815.750	51.386.372.750
465	Kab. Mamberamo Tengah	8.548.659.000	41.742.444.000	50.291.103.000	8.548.659.000	41.742.444.000	50.291.103.000
466	Kab. Yalimo	8.668.360.000	41.116.334.000	49.784.694.000	8.668.360.000	41.116.334.000	49.784.694.000
467	Kab. Lanny Jaya	8.513.767.000	40.037.353.000	48.551.120.000	8.513.767.000	40.037.353.000	48.551.120.000
468	Kab. Nduga	8.470.187.000	129.229.127.000	137.699.314.000	8.470.187.000	129.229.127.000	137.699.314.000
469	Kab. Dogiyai	8.638.198.000	128.448.044.000	137.086.242.000	8.638.198.000	128.448.044.000	137.086.242.000
470	Kab. Puncak	9.488.300.000	127.809.005.000	137.297.305.000	9.488.300.000	127.809.005.000	137.297.305.000
471	Kab. Intan Jaya	9.046.563.000	126.992.141.000	136.038.704.000	9.046.563.000	126.992.141.000	136.038.704.000
472	Kab. Deiyai	9.542.116.000	128.269.693.000	137.811.809.000	9.542.116.000	128.269.693.000	137.811.809.000
473	Provinsi Maluku Utara	101.772.569.000	824.350.680.000	926.123.249.000	101.772.569.000	824.350.680.000	926.123.249.000
474	Kab. Halmahera Tengah	113.924.478.000	1.245.397.436.000	1.359.321.914.000	113.924.478.000	1.245.397.436.000	1.359.321.914.000
475	Kota Ternate	16.980.184.000	99.575.972.000	116.556.156.000	16.980.184.000	99.537.822.500	116.518.006.500
476	Kab. Halmahera Barat	7.629.998.000	107.404.308.000	115.034.306.000	7.629.998.000	107.404.308.000	115.034.306.000
477	Kab. Halmahera Timur	120.308.279.000	641.347.860.000	761.656.139.000	120.308.279.000	641.347.860.000	761.656.139.000
478	Kab. Halmahera Selatan	36.764.862.000	498.466.608.000	535.231.470.000	36.764.862.000	495.733.648.050	532.498.510.050
479	Kab. Halmahera Utara	22.257.386.000	43.084.938.000	65.342.324.000	22.257.386.000	42.138.624.800	64.396.010.800
480	Kab. Kepulauan Sula	8.579.102.000	99.556.654.000	108.135.756.000	8.579.102.000	99.556.654.000	108.135.756.000
481	Kota Tidore Kepulauan	11.350.837.000	234.589.619.000	245.940.456.000	11.350.837.000	233.607.150.750	244.957.987.750
482	Kab. Pulau Morotai	6.355.723.000	101.670.179.000	108.025.902.000	6.355.723.000	101.469.455.750	107.825.178.750
483	Kab. Pulau Taliabu	11.731.329.000	147.216.506.000	158.947.835.000	11.731.329.000	144.513.672.600	156.245.001.600
484	Provinsi Banten	961.593.238.000	7.930.950.000	969.524.188.000	961.407.714.000	7.930.950.000	969.338.664.000
485	Kab. Lebak	80.954.844.000	16.864.826.000	97.819.670.000	80.921.714.000	16.864.826.000	97.786.540.000
486	Kab. Pandeglang	79.958.540.000	12.022.198.000	91.980.738.000	79.925.410.000	12.022.198.000	91.947.608.000
487	Kab. Serang	131.330.908.000	6.847.487.000	138.178.395.000	131.297.778.000	6.847.487.000	138.145.265.000
488	Kab. Tangerang	394.558.055.000	5.890.868.000	400.448.923.000	394.471.098.000	5.890.868.000	400.361.966.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Tahun 2023					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(8)=(6)+(7)
489	Kota Cilegon	152.347.593.000	1.940.279.000	154.287.872.000	152.314.463.000	1.940.279.000	154.254.742.000
490	Kota Tangerang	351.689.870.000	2.352.076.000	354.041.946.000	351.620.650.000	2.352.076.000	353.972.726.000
491	Kota Serang	100.528.294.000	1.752.262.000	102.280.556.000	100.495.164.000	1.752.262.000	102.247.426.000
492	Kota Tangerang Selatan	294.178.456.000	5.665.334.000	299.843.790.000	293.990.085.000	5.665.334.000	299.655.419.000
493	Provinsi Bangka Belitung	72.509.036.000	268.426.359.000	340.935.395.000	72.509.036.000	268.426.359.000	340.935.395.000
494	Kab. Bangka	43.259.412.000	152.894.877.000	196.154.289.000	43.259.412.000	152.894.877.000	196.154.289.000
495	Kab. Belitung	21.622.540.000	107.180.458.000	128.802.998.000	21.622.540.000	107.180.458.000	128.802.998.000
496	Kota Pangkal Pinang	33.667.031.000	71.158.691.000	104.825.722.000	33.667.031.000	71.158.691.000	104.825.722.000
497	Kab. Bangka Selatan	30.437.280.000	155.178.405.000	185.615.685.000	30.437.280.000	155.178.405.000	185.615.685.000
498	Kab. Bangka Tengah	16.974.038.000	107.863.705.000	124.837.743.000	16.974.038.000	107.863.705.000	124.837.743.000
499	Kab. Bangka Barat	51.578.956.000	105.913.052.000	157.492.008.000	51.578.956.000	105.913.052.000	157.492.008.000
500	Kab. Belitung Timur	20.772.625.000	119.287.153.000	140.059.778.000	20.772.625.000	119.287.153.000	140.059.778.000
501	Provinsi Gorontalo	23.468.008.000	5.416.301.000	28.884.309.000	23.467.845.320	5.416.301.000	28.884.146.320
502	Kab. Boalemo	7.686.162.000	6.095.018.000	13.781.180.000	7.686.113.000	6.095.018.000	13.781.131.000
503	Kab. Gorontalo	8.676.118.000	3.590.990.000	12.267.108.000	8.675.873.980	3.590.990.000	12.266.863.980
504	Kota Gorontalo	12.731.191.000	1.556.629.000	14.287.820.000	12.731.142.000	1.556.629.000	14.287.771.000
505	Kab. Pohuwato	7.104.829.000	6.725.967.000	13.830.796.000	7.104.780.000	6.725.967.000	13.830.747.000
506	Kab. Bone Bolango	6.796.364.000	2.577.718.000	9.374.082.000	6.796.315.000	2.530.968.850	9.327.283.850
507	Kab. Gorontalo Utara	4.590.358.000	4.109.036.000	8.699.394.000	4.590.317.330	3.962.552.950	8.552.870.280
508	Provinsi Kepulauan Riau	230.146.628.000	409.402.406.000	639.549.034.000	230.143.791.125	409.402.406.000	639.546.197.125
509	Kab. Natuna	138.058.918.000	351.121.568.000	489.180.486.000	138.058.326.925	351.121.568.000	489.179.894.925
510	Kab. Kepulauan Anambas	92.205.880.000	253.149.041.000	345.354.921.000	92.201.703.070	253.149.041.000	345.350.744.070
511	Kab. Karimun	60.642.558.000	144.615.328.000	205.257.886.000	60.638.381.070	144.526.242.050	205.164.623.120
512	Kota Batam	179.080.822.000	133.725.586.000	312.806.408.000	179.076.566.425	133.725.586.000	312.802.152.425
513	Kota Tanjung Pinang	29.121.185.000	121.288.850.000	150.410.035.000	29.120.593.925	121.288.850.000	150.409.443.925
514	Kab. Lingga	18.363.478.000	129.182.621.000	147.546.099.000	18.359.301.070	128.919.474.600	147.278.775.670
515	Kab. Bintan	27.975.489.000	129.249.709.000	157.225.198.000	27.975.252.570	129.231.397.450	157.206.650.020
516	Provinsi Papua Barat	152.359.524.000	2.833.408.186.000	2.985.767.710.000	152.359.524.000	2.833.408.186.000	2.985.767.710.000
517	Kab. Fak Fak	42.518.291.000	119.389.023.000	161.907.314.000	42.518.291.000	119.389.023.000	161.907.314.000
518	Kab. Manokwari	24.095.642.000	61.481.966.000	85.577.608.000	24.095.642.000	59.890.658.900	83.986.300.900
519	Kab. Sorong	104.731.688.000	155.640.285.000	260.371.973.000	104.731.688.000	151.686.138.550	256.417.826.550
520	Kota Sorong	20.285.984.000	67.701.307.000	87.987.291.000	20.285.984.000	67.701.307.000	87.987.291.000
521	Kab. Raja Ampat	31.982.868.000	170.627.332.000	202.610.200.000	31.982.868.000	170.627.332.000	202.610.200.000
522	Kab. Sorong Selatan	11.471.050.000	110.798.308.000	122.269.358.000	11.471.050.000	108.831.464.100	120.302.514.100
523	Kab. Teluk Bintuni	713.829.982.000	1.031.797.621.000	1.745.627.603.000	713.829.982.000	1.031.797.621.000	1.745.627.603.000
524	Kab. Teluk Wondama	12.783.042.000	108.606.694.000	121.389.736.000	12.783.042.000	101.804.536.700	114.587.578.700
525	Kab. Kaimana	15.977.500.000	203.657.484.000	219.634.984.000	15.977.500.000	203.657.484.000	219.634.984.000
526	Kab. Maybrat	10.988.541.000	105.273.411.000	116.261.952.000	10.988.541.000	102.860.812.650	113.849.353.650
527	Kab. Tambrauw	10.168.298.000	107.243.495.000	117.411.793.000	10.168.298.000	104.793.546.800	114.961.844.800
528	Kab. Manokwari Selatan	11.149.660.000	101.757.559.000	112.907.219.000	11.149.660.000	101.757.559.000	112.907.219.000
529	Kab. Pegunungan Arfak	11.370.851.000	100.278.741.000	111.649.592.000	11.370.851.000	100.278.741.000	111.649.592.000
530	Provinsi Sulawesi Barat	17.097.205.000	9.350.176.000	26.447.381.000	17.097.205.000	9.350.176.000	26.447.381.000
531	Kab. Majene	3.889.337.000	3.810.475.000	7.699.812.000	3.889.337.000	3.810.475.000	7.699.812.000
532	Kab. Mamuju	11.723.489.000	10.058.262.000	21.781.751.000	11.723.489.000	9.832.133.100	21.555.622.100
533	Kab. Polewali Mandar	5.693.881.000	5.910.694.000	11.604.575.000	5.693.881.000	5.910.694.000	11.604.575.000
534	Kab. Mamasa	2.754.154.000	3.286.742.000	6.040.896.000	2.754.154.000	3.286.742.000	6.040.896.000
535	Kab. Pasangkayu	10.687.373.000	13.929.317.000	24.616.690.000	10.687.373.000	13.887.599.850	24.574.972.850
536	Kab. Mamuju Tengah	3.709.297.000	10.451.200.000	14.160.497.000	3.709.297.000	10.451.200.000	14.160.497.000
537	Provinsi Kalimantan Utara	132.145.647.000	895.347.322.000	1.027.492.969.000	132.145.647.000	895.347.322.000	1.027.492.969.000
538	Provinsi Papua Tengah	92.378.244.000	169.984.716.000	262.362.960.000	92.378.244.000	164.192.582.100	256.570.826.100
539	Provinsi Papua Selatan	75.170.276.000	331.121.751.000	406.292.027.000	75.170.276.000	331.121.751.000	406.292.027.000
540	Provinsi Papua Pegunungan	94.915.592.000	150.037.226.000	244.952.818.000	94.915.592.000	144.924.791.400	239.840.383.400
541	Provinsi Papua Barat Daya	77.758.158.000	1.078.754.794.000	1.156.512.952.000	77.758.158.000	1.078.754.794.000	1.156.512.952.000
542	Kab. Bulungan	132.422.257.000	758.505.789.000	890.928.046.000	132.422.257.000	758.505.789.000	890.928.046.000
543	Kab. Malinau	103.961.630.000	1.478.569.620.000	1.582.531.250.000	103.961.630.000	1.478.569.620.000	1.582.531.250.000
544	Kab. Nunukan	61.967.676.000	738.149.894.000	800.117.570.000	61.967.676.000	738.149.894.000	800.117.570.000
545	Kota Tarakan	117.157.104.000	292.410.003.000	409.567.107.000	117.157.104.000	292.410.003.000	409.567.107.000
546	Kab. Tana Tidung	145.835.139.000	848.330.487.000	994.165.626.000	145.835.139.000	848.330.487.000	994.165.626.000
Jumlah		69.814.195.396.000	136.074.204.302.000	205.888.399.698.000	69.722.008.418.530	135.944.555.602.100	205.666.564.020.630

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	KPPN	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
				PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
1	BANDA ACEH	Provinsi Aceh	150.850.373.000	92.714.308.000	52.269.839.000	5.481.209.300	150.465.356.300
2	MEULABOH	Kab. Aceh Barat	52.393.282.000	8.335.205.000	43.728.875.000	307.326.000	52.371.406.000
3	BANDA ACEH	Kab. Aceh Besar	13.145.913.000	7.979.959.000	4.660.308.000	491.499.800	13.131.766.800
4	TAPAKTUAN	Kab. Aceh Selatan	7.231.900.000	4.465.758.000	2.453.365.000	312.777.000	7.231.900.000
5	TAPAKTUAN	Kab. Aceh Singkil	10.863.359.000	3.718.481.000	6.832.101.000	304.026.600	10.854.608.600
6	TAKENGON	Kab. Aceh Tengah	11.780.363.000	4.068.779.000	2.423.526.000	4.920.044.175	11.412.349.175
7	KUTACANE	Kab. Aceh Tenggara	5.301.960.000	3.386.172.000	1.596.441.000	297.011.475	5.279.624.475
8	L A N G S A	Kab. Aceh Timur	56.895.436.000	6.061.862.000	50.457.074.000	351.481.425	56.870.417.425
9	LHOKSEUMAWE	Kab. Aceh Utara	49.879.914.000	9.927.925.000	39.572.597.000	352.856.850	49.853.378.850
10	LHOKSEUMAWE	Kab. Bireuen	8.999.429.000	5.927.918.000	2.756.364.000	293.105.250	8.977.387.250
11	BANDA ACEH	Kab. Pidie	8.799.804.000	6.341.760.000	1.861.018.000	557.559.125	8.760.337.125
12	MEULABOH	Kab. Simeulue	4.245.590.000	2.493.684.000	1.439.129.000	158.186.600	4.090.999.600
13	BANDA ACEH	Kota Banda Aceh	40.590.135.000	38.745.395.000	1.465.379.000	352.828.025	40.563.602.025
14	BANDA ACEH	Kota Sabang	4.548.365.000	2.941.204.000	1.294.384.000	312.777.000	4.548.365.000
15	L A N G S A	Kota Langsa	9.635.885.000	7.069.767.000	2.253.341.000	290.901.000	9.614.009.000
16	LHOKSEUMAWE	Kota Lhokseumawe	14.989.996.000	10.890.363.000	3.653.688.000	427.231.030	14.971.282.030
17	KUTACANE	Kab. Gayo Lues	6.827.057.000	2.671.426.000	2.001.621.000	2.003.355.850	6.676.402.850
18	TAPAKTUAN	Kab. Aceh Barat Daya	6.270.241.000	3.314.535.000	2.626.504.000	316.076.400	6.257.115.400
19	MEULABOH	Kab. Aceh Jaya	5.462.766.000	2.975.450.000	2.158.114.000	307.326.000	5.440.890.000
20	MEULABOH	Kab. Nagan Raya	22.063.123.000	7.288.336.000	14.439.241.000	322.154.180	22.049.731.180
21	L A N G S A	Kab. Aceh Tamiang	78.660.343.000	5.655.122.000	72.692.444.000	312.777.000	78.660.343.000
22	TAKENGON	Kab. Bener Meriah	5.055.149.000	3.044.746.000	1.628.292.000	355.385.650	5.028.423.650
23	BANDA ACEH	Kab. Pidie Jaya	5.371.431.000	3.316.204.000	1.428.449.000	609.242.940	5.353.895.940
24	TAPAKTUAN	Kota Subulussalam	6.100.656.000	3.113.807.000	2.674.072.000	290.901.000	6.078.780.000
25	M E D A N I	Provinsi Sumatera Utara	506.384.430.000	389.747.617.000	109.167.664.000	7.469.149.000	506.384.430.000
26	TANJUNG BALAI ASAHAN	Kab. Asahan	60.946.510.000	16.113.222.000	44.541.525.000	291.763.000	60.946.510.000
27	SIDIKALANG	Kab. Dairi	12.756.773.000	8.280.163.000	3.705.484.000	771.126.000	12.756.773.000
28	TEBING TINGGI	Kab. Deli Serdang	79.914.943.000	54.247.363.000	25.369.258.000	298.322.000	79.914.943.000
29	SIDIKALANG	Kab. Karo	15.666.432.000	10.951.220.000	3.474.981.000	1.240.231.000	15.666.432.000
30	RANTAU PRAPAT	Kab. Labuhanbatu	44.358.591.000	14.591.701.000	29.465.111.000	301.779.000	44.358.591.000
31	M E D A N II	Kab. Langkat	121.303.564.000	13.421.108.000	107.590.693.000	291.763.000	121.303.564.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	KPPN	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
				PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
32	PADANG SIDEMPUAN	Kab. Mandailing Natal	42.490.857.000	10.630.806.000	31.565.794.000	294.257.000	42.490.857.000
33	GUNUNG SITOLI	Kab. Nias	9.104.294.000	6.438.491.000	2.374.040.000	291.763.000	9.104.294.000
34	PEMATANG SIANTAR	Kab. Simalungun	58.888.855.000	21.171.977.000	36.758.514.000	958.364.000	58.888.855.000
35	PADANG SIDEMPUAN	Kab. Tapanuli Selatan	87.206.106.000	13.598.584.000	73.315.759.000	291.763.000	87.206.106.000
36	SIBOLGA	Kab. Tapanuli Tengah	14.687.821.000	7.909.484.000	6.486.574.000	291.763.000	14.687.821.000
37	BALIGE	Kab. Tapanuli Utara	49.637.139.000	9.157.002.000	38.535.746.000	1.944.391.000	49.637.139.000
38	BALIGE	Kab. Toba Samosir	16.540.758.000	13.220.887.000	3.028.108.000	291.763.000	16.540.758.000
39	M E D A N II	Kota Binjai	16.559.315.000	11.447.633.000	4.819.919.000	291.763.000	16.559.315.000
40	M E D A N I	Kota Medan	275.112.683.000	269.252.709.000	5.555.996.000	303.978.000	275.112.683.000
41	PEMATANG SIANTAR	Kota Pematang Siantar	25.843.606.000	16.622.532.000	2.382.641.000	6.838.433.000	25.843.606.000
42	SIBOLGA	Kota Sibolga	12.699.397.000	9.892.026.000	2.515.608.000	291.763.000	12.699.397.000
43	TANJUNG BALAI ASAHAN	Kota Tanjung Balai	11.890.873.000	9.278.637.000	2.320.473.000	291.763.000	11.890.873.000
44	TEBING TINGGI	Kota Tebing Tinggi	13.036.877.000	10.296.738.000	2.448.376.000	291.763.000	13.036.877.000
45	PADANG SIDEMPUAN	Kota Padang Sidempuan	14.111.871.000	11.055.877.000	2.764.231.000	291.763.000	14.111.871.000
46	SIDIKALANG	Kab. Pakpak Bharat	9.110.751.000	6.171.273.000	2.640.649.000	298.829.000	9.110.751.000
47	GUNUNG SITOLI	Kab. Nias Selatan	12.589.123.000	7.658.769.000	4.638.591.000	291.763.000	12.589.123.000
48	BALIGE	Kab. Humbang Hasundutan	11.362.907.000	7.428.539.000	3.134.559.000	799.809.000	11.362.907.000
49	TEBING TINGGI	Kab. Serdang Bedagai	47.393.958.000	15.239.935.000	31.862.260.000	291.763.000	47.393.958.000
50	BALIGE	Kab. Samosir	10.374.744.000	6.780.749.000	3.302.232.000	291.763.000	10.374.744.000
51	TANJUNG BALAI ASAHAN	Kab. Batu Bara	29.963.467.000	18.804.705.000	10.866.999.000	291.763.000	29.963.467.000
52	PADANG SIDEMPUAN	Kab. Padang Lawas	28.809.912.000	9.918.840.000	18.505.469.000	385.603.000	28.809.912.000
53	PADANG SIDEMPUAN	Kab. Padang Lawas Utara	24.770.431.000	8.424.524.000	16.044.128.000	301.779.000	24.770.431.000
54	RANTAU PRAPAT	Kab. Labuhanbatu Selatan	59.639.354.000	12.354.905.000	46.982.670.000	293.616.480	59.631.191.480
55	RANTAU PRAPAT	Kab. Labuhanbatu Utara	33.142.448.000	10.939.606.000	21.911.079.000	291.763.000	33.142.448.000
56	GUNUNG SITOLI	Kab. Nias Utara	9.289.679.000	6.479.439.000	2.518.477.000	291.763.000	9.289.679.000
57	GUNUNG SITOLI	Kab. Nias Barat	9.848.737.000	6.886.456.000	2.670.518.000	291.763.000	9.848.737.000
58	GUNUNG SITOLI	Kota Gunungsitoli	11.299.992.000	8.409.025.000	2.599.204.000	291.763.000	11.299.992.000
59	P A D A N G	Provinsi Sumatera Barat	137.841.296.000	119.852.734.000	17.330.265.000	658.297.000	137.841.296.000
60	BUKITTINGGI	Kab. Lima Puluh Kota	7.567.728.000	5.235.284.000	1.889.180.000	443.264.000	7.567.728.000
61	BUKITTINGGI	Kab. Agam	12.360.044.000	7.594.082.000	4.526.295.000	239.667.000	12.360.044.000
62	P A D A N G	Kab. Kepulauan Mentawai	6.927.560.000	3.947.618.000	2.929.345.000	49.318.040	6.926.281.040
63	P A D A N G	Kab. Padang Pariaman	8.454.859.000	7.260.184.000	1.148.959.000	44.437.040	8.453.580.040
64	LUBUK SIKAPING	Kab. Pasaman	7.120.666.000	5.827.339.000	1.209.675.000	83.652.000	7.120.666.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	KPPN	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
				PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
65	P A I N A N	Kab. Pesisir Selatan	16.449.052.000	8.004.171.000	8.399.165.000	23.121.040	16.426.457.040
66	SIJUNJUNG	Kab. Sijunjung	8.708.293.000	4.842.606.000	3.815.090.000	49.318.040	8.707.014.040
67	S O L O K	Kab. Solok	7.989.039.000	5.919.851.000	1.970.487.000	96.123.820	7.986.461.820
68	BUKITTINGGI	Kab. Tanah Datar	8.363.714.000	6.955.304.000	1.086.999.000	321.411.000	8.363.714.000
69	BUKITTINGGI	Kota Bukit Tinggi	11.971.233.000	11.137.489.000	788.028.000	45.716.000	11.971.233.000
70	BUKITTINGGI	Kota Padang Panjang	5.801.340.000	5.016.919.000	738.705.000	44.437.040	5.800.061.040
71	P A D A N G	Kota Padang	92.473.884.000	84.258.938.000	8.164.349.000	49.318.040	92.472.605.040
72	BUKITTINGGI	Kota Payakumbuh	7.762.209.000	6.911.577.000	799.419.000	51.213.000	7.762.209.000
73	SIJUNJUNG	Kota Sawahlunto	8.816.213.000	4.914.793.000	3.807.352.000	94.068.000	8.816.213.000
74	S O L O K	Kota Solok	8.681.404.000	7.772.017.000	863.671.000	45.716.000	8.681.404.000
75	P A D A N G	Kota Pariaman	6.243.342.000	5.283.465.000	914.161.000	45.716.000	6.243.342.000
76	LUBUK SIKAPING	Kab. Pasaman Barat	20.642.641.000	7.235.197.000	13.361.728.000	45.716.000	20.642.641.000
77	SIJUNJUNG	Kab. Dharmasraya	17.826.574.000	5.651.386.000	12.129.472.000	45.716.000	17.826.574.000
78	S O L O K	Kab. Solok Selatan	32.513.753.000	7.154.788.000	25.313.249.000	44.437.040	32.512.474.040
79	PEKANBARU	Provinsi Riau	863.242.953.000	230.106.620.000	633.135.147.000	583.230	863.242.350.230
80	D U M A I	Kab. Bengkalis	1.590.457.418.000	44.113.966.000	1.546.343.298.000	49.420	1.590.457.313.420
81	R E N G A T	Kab. Indragiri Hilir	88.656.237.000	17.126.153.000	71.529.930.000	28.000	88.656.111.000
82	R E N G A T	Kab. Indragiri Hulu	117.349.847.000	16.462.271.000	100.887.441.000	9.000	117.349.721.000
83	PEKANBARU	Kab. Kampar	317.550.722.000	18.767.170.000	298.783.398.000	28.000	317.550.596.000
84	R E N G A T	Kab. Kuantan Singingi	60.263.975.000	13.413.590.000	46.850.231.000	28.000	60.263.849.000
85	PEKANBARU	Kab. Pelalawan	196.578.970.000	37.338.494.000	159.240.322.000	28.000	196.578.844.000
86	D U M A I	Kab. Rokan Hilir	371.989.241.000	14.692.816.000	357.296.271.000	28.000	371.989.115.000
87	PEKANBARU	Kab. Rokan Hulu	102.172.825.000	15.237.504.000	86.935.167.000	28.000	102.172.699.000
88	PEKANBARU	Kab. Siak	528.721.002.000	30.487.449.000	498.233.399.000	28.000	528.720.876.000
89	D U M A I	Kota Dumai	90.319.115.000	36.192.662.000	54.126.299.000	28.000	90.318.989.000
90	PEKANBARU	Kota Pekanbaru	182.654.498.000	132.896.235.000	49.756.201.000	401.000	182.652.837.000
91	D U M A I	Kab. Kepulauan Meranti	93.268.840.000	12.795.303.000	80.473.383.000	28.000	93.268.714.000
92	J A M B I	Provinsi Jambi	193.333.890.000	77.746.618.000	115.048.194.000	516.455.735	193.311.267.735
93	J A M B I	Kab. Batanghari	100.246.131.000	7.838.105.000	92.335.888.000	67.425.075	100.241.418.075
94	MUARA BUNGO	Kab. Bungo	27.674.204.000	11.319.000.000	16.287.820.000	62.671.075	27.669.491.075
95	SUNGAI PENUH	Kab. Kerinci	13.130.094.000	4.829.548.000	7.559.907.000	719.918.510	13.109.373.510
96	B A N G K O	Kab. Merangin	14.745.264.000	6.902.234.000	7.755.146.000	81.737.300	14.739.117.300
97	J A M B I	Kab. Muaro Jambi	89.295.598.000	8.941.513.000	80.281.947.000	9.299.000	89.232.759.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	KPPN	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
				PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
98	B A N G K O	Kab. Sarolangun	54.838.538.000	7.499.723.000	47.266.677.000	9.299.000	54.775.699.000
99	KUALA TUNGKAL	Kab. Tanjung Jabung Barat	271.390.516.000	9.398.874.000	261.919.504.000	38.833.330	271.357.211.330
100	KUALA TUNGKAL	Kab. Tanjung Jabung Timur	60.635.975.000	9.331.236.000	51.237.355.000	4.545.000	60.573.136.000
101	MUARA BUNGO	Kab. Tebo	34.597.713.000	5.650.776.000	28.874.799.000	21.866.800	34.547.441.800
102	J A M B I	Kota Jambi	84.021.726.000	48.130.131.000	35.824.211.000	4.545.000	83.958.887.000
103	SUNGAI PENUH	Kota Sungai Penuh	12.727.046.000	6.532.036.000	6.080.153.000	25.955.700	12.638.144.700
104	PALEMBANG	Provinsi Sumatera Selatan	774.587.119.000	229.528.462.000	544.992.350.000	14.983.950	774.535.795.950
105	L A H A T	Kab. Lahat	259.013.857.000	18.455.561.000	240.479.623.000	73.363.150	259.008.547.150
106	S E K A Y U	Kab. Musi Banyuasin	955.190.327.000	21.260.275.000	933.923.396.000	6.293.675	955.189.964.675
107	LUBUK LINGGAU	Kab. Musi Rawas	240.438.265.000	12.040.419.000	228.391.190.000	4.844.375	240.436.453.375
108	L A H A T	Kab. Muara Enim	620.197.487.000	69.822.860.000	550.369.447.000	349.000	620.192.656.000
109	PALEMBANG	Kab. Ogan Komering Ilir	77.615.331.000	14.237.846.000	63.372.305.000	349.000	77.610.500.000
110	BATURAJA	Kab. Ogan Komering Ulu	103.213.073.000	12.153.233.000	91.054.660.000	349.000	103.208.242.000
111	PALEMBANG	Kota Palembang	149.284.051.000	129.776.371.000	19.501.024.000	1.825.000	149.279.220.000
112	PALEMBANG	Kota Prabumulih	124.848.251.000	19.484.276.000	105.357.319.000	1.825.000	124.843.420.000
113	L A H A T	Kota Pagar Alam	29.222.727.000	8.309.536.000	20.906.535.000	1.825.000	29.217.896.000
114	LUBUK LINGGAU	Kota Lubuk Linggau	31.416.862.000	11.483.204.000	19.928.478.000	349.000	31.412.031.000
115	S E K A Y U	Kab. Banyuasin	92.963.656.000	16.806.492.000	76.150.508.000	2.646.270	92.959.646.270
116	PALEMBANG	Kab. Ogan Ilir	73.151.366.000	9.323.164.000	63.823.022.000	4.817.675	73.151.003.675
117	BATURAJA	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	35.092.211.000	9.720.558.000	25.366.473.000	1.170.270	35.088.201.270
118	BATURAJA	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	31.539.497.000	8.516.842.000	22.993.931.000	14.526.890	31.525.299.890
119	L A H A T	Kab. Empat Lawang	29.038.940.000	7.436.463.000	21.595.821.000	2.646.270	29.034.930.270
120	L A H A T	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	513.516.237.000	9.833.888.000	503.675.693.000	2.646.270	513.512.227.270
121	LUBUK LINGGAU	Kab. Musi Rawas Utara	86.785.604.000	8.244.254.000	78.534.694.000	1.825.000	86.780.773.000
122	B E N G K U L U	Provinsi Bengkulu	47.708.294.000	37.638.180.000	10.070.114.000	-	47.708.294.000
123	M A N N A	Kab. Bengkulu Selatan	5.026.096.000	3.699.548.000	1.326.548.000	-	5.026.096.000
124	B E N G K U L U	Kab. Bengkulu Utara	20.415.722.000	5.522.043.000	14.893.679.000	-	20.415.722.000
125	C U R U P	Kab. Rejang Lebong	6.104.242.000	4.868.530.000	1.235.712.000	-	6.104.242.000
126	B E N G K U L U	Kota Bengkulu	28.547.560.000	27.522.879.000	1.024.681.000	-	28.547.560.000
127	M A N N A	Kab. Kaur	6.132.037.000	3.228.260.000	2.903.777.000	-	6.132.037.000
128	M A N N A	Kab. Seluma	8.561.948.000	3.229.190.000	5.332.758.000	-	8.561.948.000
129	MUKOMUKO	Kab. Mukomuko	16.095.196.000	4.924.100.000	11.171.096.000	-	16.095.196.000
130	C U R U P	Kab. Lebong	6.894.897.000	2.635.300.000	4.259.597.000	-	6.894.897.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	KPPN	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
				PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
131	C U R U P	Kab. Kepahiang	4.411.661.000	3.222.704.000	1.188.957.000	-	4.411.661.000
132	B E N G K U L U	Kab. Bengkulu Tengah	9.976.771.000	3.635.139.000	6.341.632.000	-	9.976.771.000
133	BANDAR LAMPUNG	Provinsi Lampung	124.856.883.000	98.470.564.000	24.609.471.000	1.652.573.000	124.732.608.000
134	L I W A	Kab. Lampung Barat	6.805.621.000	5.078.703.000	1.560.198.000	108.416.875	6.747.317.875
135	BANDAR LAMPUNG	Kab. Lampung Selatan	25.052.500.000	13.868.236.000	11.002.145.000	12.284.000	24.882.665.000
136	METRO LAMPUNG	Kab. Lampung Tengah	35.645.699.000	16.395.183.000	19.049.798.000	13.538.000	35.458.519.000
137	KOTABUMI	Kab. Lampung Utara	12.207.041.000	9.190.876.000	2.848.838.000	82.284.655	12.121.998.655
138	METRO LAMPUNG	Kab. Lampung Timur	43.360.604.000	7.768.626.000	34.077.704.000	783.370.080	42.629.700.080
139	BANDAR LAMPUNG	Kab. Tanggamus	36.325.596.000	6.951.076.000	29.092.981.000	183.083.125	36.227.140.125
140	KOTABUMI	Kab. Tulang Bawang	20.354.703.000	7.331.070.000	12.856.350.000	11.283.000	20.198.703.000
141	KOTABUMI	Kab. Way Kanan	17.653.710.000	8.138.718.000	9.325.788.000	175.970.850	17.640.476.850
142	BANDAR LAMPUNG	Kota Bandar Lampung	68.247.146.000	65.703.371.000	2.107.658.000	405.614.425	68.216.643.425
143	METRO LAMPUNG	Kota Metro	11.858.636.000	10.362.819.000	1.331.395.000	11.090.000	11.705.304.000
144	BANDAR LAMPUNG	Kab. Pesawaran	9.505.657.000	4.963.960.000	4.274.293.000	248.701.400	9.486.954.400
145	BANDAR LAMPUNG	Kab. Pringsewu	9.186.299.000	7.284.799.000	1.651.723.000	242.789.100	9.179.311.100
146	KOTABUMI	Kab. Mesuji	17.699.486.000	4.686.625.000	12.415.625.000	555.464.600	17.657.714.600
147	KOTABUMI	Kab. Tulang Bawang Barat	8.360.652.000	4.606.225.000	3.586.923.000	155.788.550	8.348.936.550
148	L I W A	Kab. Pesisir Barat	5.919.455.000	3.804.012.000	1.945.290.000	86.054.720	5.835.356.720
149	JAKARTA I	Provinsi DKI Jakarta	20.923.231.238.000	20.875.325.196.000	46.899.611.000	1.006.431.000	20.923.231.238.000
150	BANDUNG I	Provinsi Jawa Barat	1.983.937.228.000	1.682.549.738.000	116.943.867.000	184.443.623.000	1.983.937.228.000
151	BANDUNG II	Kab. Bandung	205.191.609.000	96.267.531.000	85.337.147.000	23.586.931.000	205.191.609.000
152	B E K A S I	Kab. Bekasi	564.961.289.000	515.988.644.000	40.096.148.000	8.876.497.000	564.961.289.000
153	B O G O R	Kab. Bogor	254.557.034.000	186.210.435.000	59.910.651.000	8.435.948.000	254.557.034.000
154	TASIKMALAYA	Kab. Ciamis	51.173.536.000	36.719.117.000	5.964.480.000	8.489.939.000	51.173.536.000
155	SUKABUMI	Kab. Cianjur	65.196.338.000	44.854.299.000	11.625.456.000	8.716.583.000	65.196.338.000
156	C I R E B O N	Kab. Cirebon	78.440.332.000	56.616.062.000	11.097.619.000	10.726.651.000	78.440.332.000
157	G A R U T	Kab. Garut	133.057.103.000	45.650.035.000	47.254.627.000	40.152.441.000	133.057.103.000
158	C I R E B O N	Kab. Indramayu	157.225.777.000	49.897.958.000	98.943.136.000	8.384.683.000	157.225.777.000
159	KARAWANG	Kab. Karawang	487.502.788.000	273.306.076.000	57.529.308.000	145.709.889.750	476.545.273.750
160	KUNINGAN	Kab. Kuningan	50.621.337.000	36.861.210.000	4.334.844.000	9.425.283.000	50.621.337.000
161	KUNINGAN	Kab. Majalengka	85.346.804.000	39.137.442.000	13.156.993.000	33.052.369.000	85.346.804.000
162	PURWAKARTA	Kab. Purwakarta	99.125.266.000	82.340.509.000	8.400.074.000	8.384.683.000	99.125.266.000
163	PURWAKARTA	Kab. Subang	153.287.314.000	57.090.439.000	87.279.528.000	8.917.347.000	153.287.314.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	KPPN	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
				PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
164	SUKABUMI	Kab. Sukabumi	104.816.872.000	54.033.246.000	42.390.781.000	8.392.845.000	104.816.872.000
165	SUMEDANG	Kab. Sumedang	86.248.819.000	44.136.543.000	7.222.301.000	34.889.975.000	86.248.819.000
166	TASIKMALAYA	Kab. Tasikmalaya	56.382.715.000	39.291.395.000	8.598.398.000	8.492.922.000	56.382.715.000
167	BANDUNG II	Kota Bandung	479.879.508.000	465.835.098.000	4.842.695.000	9.201.715.000	479.879.508.000
168	B E K A S I	Kota Bekasi	178.465.247.000	160.976.454.000	8.963.826.000	8.524.967.000	178.465.247.000
169	B O G O R	Kota Bogor	91.358.022.000	79.239.166.000	3.726.347.000	8.392.509.000	91.358.022.000
170	C I R E B O N	Kota Cirebon	63.204.296.000	51.449.865.000	3.352.203.000	8.167.163.060	62.969.231.060
171	B O G O R	Kota Depok	122.954.122.000	110.136.509.000	4.237.251.000	7.980.240.725	122.354.000.725
172	SUKABUMI	Kota Sukabumi	52.750.901.000	41.367.363.000	2.996.894.000	8.386.644.000	52.750.901.000
173	TASIKMALAYA	Kota Tasikmalaya	56.566.292.000	44.660.180.000	3.521.337.000	8.150.198.340	56.331.715.340
174	BANDUNG I	Kota Cimahi	63.641.394.000	51.984.790.000	3.228.263.000	8.428.341.000	63.641.394.000
175	TASIKMALAYA	Kota Banjar	47.237.730.000	35.219.539.000	3.623.488.000	8.394.703.000	47.237.730.000
176	BANDUNG I	Kab. Bandung Barat	76.894.818.000	59.238.903.000	7.821.645.000	9.834.270.000	76.894.818.000
177	TASIKMALAYA	Kab. Pangandaran	48.636.151.000	34.164.023.000	5.788.001.000	8.684.127.000	48.636.151.000
178	SEMARANG I	Provinsi Jawa Tengah	964.684.633.000	565.797.958.000	42.866.542.000	356.020.133.000	964.684.633.000
179	BANJARNEGARA	Kab. Banjarnegara	38.151.417.000	15.308.680.000	9.209.172.000	13.633.565.000	38.151.417.000
180	PURWOKERTO	Kab. Banyumas	51.265.119.000	32.624.994.000	5.671.840.000	12.968.285.000	51.265.119.000
181	PEKALONGAN	Kab. Batang	46.243.016.000	25.271.465.000	6.212.425.000	14.759.126.000	46.243.016.000
182	PURWODADI	Kab. Blora	118.105.883.000	15.740.310.000	79.591.540.000	22.774.033.000	118.105.883.000
183	K L A T E N	Kab. Boyolali	57.550.326.000	18.576.637.000	3.639.139.000	35.334.550.000	57.550.326.000
184	T E G A L	Kab. Brebes	40.581.156.000	19.877.052.000	7.245.968.000	13.458.136.000	40.581.156.000
185	CILACAP	Kab. Cilacap	59.561.142.000	33.812.478.000	12.727.640.000	13.021.024.000	59.561.142.000
186	K U D U S	Kab. Demak	69.248.644.000	18.470.226.000	2.378.891.000	48.399.527.000	69.248.644.000
187	PURWODADI	Kab. Grobogan	57.479.726.000	16.945.362.000	12.139.544.000	28.394.820.000	57.479.726.000
188	K U D U S	Kab. Jepara	55.735.868.000	35.397.031.000	5.899.675.000	14.439.162.000	55.735.868.000
189	S R A G E N	Kab. Karanganyar	52.902.898.000	25.242.000.000	3.583.198.000	24.077.700.000	52.902.898.000
190	PURWOREJO	Kab. Kebumen	36.041.264.000	17.378.786.000	3.620.360.000	15.042.118.000	36.041.264.000
191	SEMARANG II	Kab. Kendal	55.529.273.000	18.240.543.000	7.553.769.000	29.734.961.000	55.529.273.000
192	K L A T E N	Kab. Klaten	50.713.922.000	20.730.494.000	2.102.995.000	27.880.433.000	50.713.922.000
193	K U D U S	Kab. Kudus	341.094.608.000	83.506.605.000	1.815.290.000	255.772.713.000	341.094.608.000
194	MAGELANG	Kab. Magelang	43.148.907.000	15.360.348.000	2.416.319.000	25.372.240.000	43.148.907.000
195	P A T I	Kab. Pati	42.367.612.000	20.227.023.000	7.061.505.000	15.079.084.000	42.367.612.000
196	PEKALONGAN	Kab. Pekalongan	27.893.398.000	11.773.687.000	3.332.364.000	12.787.347.000	27.893.398.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	KPPN	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
				PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
197	T E G A L	Kab. Pemalang	31.037.543.000	14.475.266.000	2.788.130.000	13.774.147.000	31.037.543.000
198	PURWOKERTO	Kab. Purbalingga	32.708.303.000	16.106.102.000	2.173.432.000	14.428.769.000	32.708.303.000
199	PURWOREJO	Kab. Purworejo	31.193.340.000	14.153.869.000	2.552.673.000	14.486.798.000	31.193.340.000
200	P A T I	Kab. Rembang	64.530.706.000	14.943.301.000	5.069.034.000	44.518.371.000	64.530.706.000
201	SEMARANG II	Kab. Semarang	45.816.881.000	23.876.854.000	6.031.628.000	15.908.399.000	45.816.881.000
202	S R A G E N	Kab. Sragen	33.133.095.000	16.917.524.000	3.277.890.000	12.937.681.000	33.133.095.000
203	SURAKARTA	Kab. Sukoharjo	43.574.785.000	28.320.203.000	2.035.033.000	13.219.549.000	43.574.785.000
204	T E G A L	Kab. Tegal	39.098.850.000	20.214.941.000	4.181.231.000	14.702.678.000	39.098.850.000
205	MAGELANG	Kab. Temanggung	72.880.121.000	15.015.797.000	2.792.465.000	55.071.859.000	72.880.121.000
206	SURAKARTA	Kab. Wonogiri	44.839.188.000	15.000.319.000	2.803.876.000	27.034.993.000	44.839.188.000
207	BANJARNEGARA	Kab. Wonosobo	36.991.823.000	12.815.527.000	5.792.804.000	18.383.492.000	36.991.823.000
208	MAGELANG	Kota Magelang	32.442.193.000	18.670.045.000	976.965.000	12.795.183.000	32.442.193.000
209	PEKALONGAN	Kota Pekalongan	33.102.950.000	17.810.566.000	1.110.058.000	14.182.326.000	33.102.950.000
210	SEMARANG II	Kota Salatiga	31.230.717.000	17.421.255.000	1.114.008.000	12.695.454.000	31.230.717.000
211	SEMARANG I	Kota Semarang	213.191.661.000	194.320.399.000	2.879.094.000	15.992.168.000	213.191.661.000
212	SURAKARTA	Kota Surakarta	66.395.010.000	50.493.913.000	1.345.561.000	14.555.536.000	66.395.010.000
213	T E G A L	Kota Tegal	33.243.281.000	19.441.581.000	1.109.196.000	12.692.504.000	33.243.281.000
214	YOGYAKARTA	Provinsi DI Yogyakarta	122.536.869.000	116.964.316.000	973.001.000	4.599.552.000	122.536.869.000
215	YOGYAKARTA	Kab. Bantul	38.259.989.000	32.448.321.000	1.067.321.000	4.744.347.000	38.259.989.000
216	WONOSARI	Kab. Gunung Kidul	19.536.537.000	16.487.014.000	997.125.000	2.052.398.000	19.536.537.000
217	W A T E S	Kab. Kulon Progo	19.032.328.000	16.973.088.000	716.948.000	1.342.292.000	19.032.328.000
218	YOGYAKARTA	Kab. Sleman	72.915.801.000	68.861.197.000	1.580.389.000	2.474.215.000	72.915.801.000
219	YOGYAKARTA	Kota Yogyakarta	58.154.602.000	56.221.109.000	561.911.000	1.333.209.930	58.116.229.930
220	SURABAYA II	Provinsi Jawa Timur	2.200.466.150.000	961.515.429.000	311.442.082.000	866.013.461.500	2.138.970.972.500
221	PAMEKASAN	Kab. Bangkalan	54.630.428.000	17.756.224.000	5.558.892.000	30.439.219.150	53.754.335.150
222	BANYUWANGI	Kab. Banyuwangi	101.079.483.000	28.500.501.000	38.335.451.000	34.243.531.000	101.079.483.000
223	B L I T A R	Kab. Blitar	61.249.227.000	16.880.628.000	9.178.379.000	35.190.220.000	61.249.227.000
224	BOJONEGORO	Kab. Bojonegoro	1.298.342.893.000	27.883.883.000	1.176.100.796.000	91.834.768.830	1.295.819.447.830
225	BONDOWOSO	Kab. Bondowoso	91.430.483.000	15.153.993.000	6.423.555.000	69.852.935.000	91.430.483.000
226	SURABAYA I	Kab. Gresik	161.704.862.000	86.355.582.000	43.857.177.000	31.492.103.000	161.704.862.000
227	J E M B E R	Kab. Jember	165.454.483.000	32.985.759.000	15.304.166.000	117.164.558.000	165.454.483.000
228	MOJOKERTO	Kab. Jombang	95.955.910.000	26.669.726.000	6.029.476.000	61.573.880.830	94.273.082.830
229	K E D I R I	Kab. Kediri	127.867.496.000	21.656.296.000	9.772.118.000	93.741.053.960	125.169.467.960

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	KPPN	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
				PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
230	BOJONEGORO	Kab. Lamongan	105.152.247.000	20.231.150.000	8.278.622.000	76.642.475.000	105.152.247.000
231	J E M B E R	Kab. Lumajang	61.800.222.000	18.218.219.000	9.024.968.000	34.557.035.000	61.800.222.000
232	M A D I U N	Kab. Madiun	55.631.738.000	17.403.806.000	3.988.734.000	34.239.198.000	55.631.738.000
233	M A D I U N	Kab. Magetan	54.718.993.000	17.841.807.000	4.117.027.000	31.843.644.390	53.802.478.390
234	M A L A N G	Kab. Malang	187.433.391.000	41.481.055.000	17.956.472.000	127.995.864.000	187.433.391.000
235	MOJOKERTO	Kab. Mojokerto	71.472.406.000	33.976.288.000	5.441.503.000	32.054.615.000	71.472.406.000
236	K E D I R I	Kab. Nganjuk	64.490.235.000	17.819.481.000	6.808.704.000	39.862.050.000	64.490.235.000
237	M A D I U N	Kab. Ngawi	72.872.329.000	19.015.031.000	12.398.197.000	41.459.101.000	72.872.329.000
238	PACITAN	Kab. Pacitan	52.663.056.000	15.990.537.000	4.040.991.000	32.631.528.000	52.663.056.000
239	PAMEKASAN	Kab. Pamekasan	139.833.495.000	22.060.583.000	3.778.083.000	113.994.829.000	139.833.495.000
240	M A L A N G	Kab. Pasuruan	434.726.345.000	69.053.453.000	6.234.475.000	359.438.417.000	434.726.345.000
241	M A D I U N	Kab. Ponorogo	64.210.949.000	20.137.488.000	7.230.828.000	36.842.633.000	64.210.949.000
242	BONDOWOSO	Kab. Probolinggo	123.646.043.000	20.969.033.000	5.836.164.000	96.840.846.000	123.646.043.000
243	PAMEKASAN	Kab. Sampang	59.416.468.000	14.652.743.000	4.091.537.000	40.672.188.000	59.416.468.000
244	SIDOARJO	Kab. Sidoarjo	202.135.167.000	144.658.836.000	17.277.672.000	40.198.659.000	202.135.167.000
245	BONDOWOSO	Kab. Situbondo	95.264.993.000	17.851.942.000	6.595.987.000	70.817.064.000	95.264.993.000
246	PAMEKASAN	Kab. Sumenep	90.581.830.000	17.528.115.000	11.211.177.000	61.842.538.000	90.581.830.000
247	K E D I R I	Kab. Trenggalek	54.542.117.000	16.174.328.000	6.329.021.000	32.038.768.000	54.542.117.000
248	T U B A N	Kab. Tuban	115.766.344.000	27.056.573.000	44.176.548.000	44.533.223.000	115.766.344.000
249	B L I T A R	Kab. Tulungagung	71.078.968.000	23.367.095.000	6.124.926.000	41.586.947.000	71.078.968.000
250	B L I T A R	Kota Blitar	55.597.760.000	20.638.384.000	3.224.885.000	31.734.491.000	55.597.760.000
251	K E D I R I	Kota Kediri	216.320.097.000	46.813.085.000	3.252.078.000	166.254.934.000	216.320.097.000
252	M A D I U N	Kota Madiun	61.670.223.000	26.747.814.000	3.173.003.000	30.861.168.730	60.781.985.730
253	M A L A N G	Kota Malang	131.184.635.000	67.091.400.000	3.636.016.000	60.457.219.000	131.184.635.000
254	MOJOKERTO	Kota Mojokerto	58.377.109.000	20.307.349.000	3.078.819.000	34.012.016.910	57.398.184.910
255	M A L A N G	Kota Pasuruan	53.677.360.000	18.863.533.000	3.209.617.000	30.720.034.790	52.793.184.790
256	BONDOWOSO	Kota Probolinggo	58.044.871.000	18.422.902.000	3.233.337.000	35.370.605.430	57.026.844.430
257	SURABAYA II	Kota Surabaya	600.638.527.000	545.504.367.000	5.596.135.000	49.538.025.000	600.638.527.000
258	M A L A N G	Kota Batu	51.113.113.000	16.318.065.000	3.578.799.000	30.342.927.580	50.239.791.580
259	PONTIANAK	Provinsi Kalimantan Barat	172.698.431.000	110.714.921.000	61.701.955.000	269.835.020	172.686.711.020
260	SINGKAWANG	Kab. Bengkayang	21.288.081.000	6.750.310.000	14.116.377.000	421.394.000	21.288.081.000
261	SANGGAU	Kab. Landak	23.243.703.000	5.964.162.000	17.252.688.000	24.974.850	23.241.824.850
262	PUTUSSIBAU	Kab. Kapuas Hulu	25.615.217.000	8.519.929.000	17.068.232.000	25.175.825	25.613.336.825

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	KPPN	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
				PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
263	KETAPANG	Kab. Ketapang	149.542.506.000	22.356.758.000	127.158.721.000	25.148.850	149.540.627.850
264	PONTIANAK	Kab. Mempawah	15.077.861.000	6.945.309.000	8.105.699.000	25.726.110	15.076.734.110
265	SINGKAWANG	Kab. Sambas	25.815.082.000	7.927.956.000	17.860.273.000	24.974.850	25.813.203.850
266	SANGGAU	Kab. Sanggau	69.150.195.000	10.464.351.000	58.658.817.000	25.148.850	69.148.316.850
267	S I N T A N G	Kab. Sintang	42.025.898.000	10.720.968.000	31.277.903.000	25.148.850	42.024.019.850
268	PONTIANAK	Kota Pontianak	64.351.816.000	61.252.250.000	3.072.012.000	25.641.200	64.349.903.200
269	SINGKAWANG	Kota Singkawang	13.650.133.000	10.566.999.000	3.056.281.000	25.726.110	13.649.006.110
270	SANGGAU	Kab. Sekadau	25.323.209.000	8.388.780.000	16.907.402.000	25.900.110	25.322.082.110
271	S I N T A N G	Kab. Melawi	18.279.648.000	6.305.436.000	11.947.185.000	25.148.850	18.277.769.850
272	KETAPANG	Kab. Kayong Utara	14.678.053.000	5.790.416.000	8.860.610.000	27.027.000	14.678.053.000
273	PONTIANAK	Kab. Kubu Raya	39.170.447.000	15.252.917.000	23.890.503.000	25.148.850	39.168.568.850
274	PALANGKARAYA	Provinsi Kalimantan Tengah	252.704.792.000	95.757.037.000	156.947.734.000	1.000	252.704.772.000
275	B U N T O K	Kab. Barito Selatan	14.309.402.000	6.906.344.000	7.403.056.000	-	14.309.400.000
276	B U N T O K	Kab. Barito Utara	142.480.701.000	11.843.478.000	130.637.221.000	-	142.480.699.000
277	PALANGKARAYA	Kab. Kapuas	201.625.999.000	8.677.017.000	192.948.980.000	-	201.625.997.000
278	PANGKALAN BUN	Kab. Kotawaringin Barat	58.296.342.000	21.874.026.000	36.422.314.000	-	58.296.340.000
279	S A M P I T	Kab. Kotawaringin Timur	116.534.608.000	23.517.014.000	93.017.561.000	2.000	116.534.577.000
280	PALANGKARAYA	Kota Palangkaraya	33.745.954.000	28.219.171.000	5.526.781.000	-	33.745.952.000
281	S A M P I T	Kab. Katingan	34.940.026.000	6.078.424.000	28.861.600.000	-	34.940.024.000
282	S A M P I T	Kab. Seruyan	75.709.222.000	8.285.070.000	67.424.150.000	-	75.709.220.000
283	PANGKALAN BUN	Kab. Sukamara	17.122.669.000	5.667.112.000	11.455.555.000	-	17.122.667.000
284	PANGKALAN BUN	Kab. Lamandau	30.198.512.000	5.164.378.000	25.034.132.000	340	30.198.510.340
285	PALANGKARAYA	Kab. Gunung Mas	30.500.626.000	6.835.477.000	23.665.147.000	-	30.500.624.000
286	PALANGKARAYA	Kab. Pulang Pisau	25.975.149.000	5.507.640.000	20.467.507.000	-	25.975.147.000
287	B U N T O K	Kab. Murung Raya	134.052.373.000	11.237.203.000	122.815.168.000	-	134.052.371.000
288	B U N T O K	Kab. Barito Timur	28.255.638.000	10.473.899.000	17.781.737.000	-	28.255.636.000
289	BANJARMASIN	Provinsi Kalimantan Selatan	285.579.718.000	150.691.003.000	134.884.620.000	386.000	285.576.009.000
290	BANJARMASIN	Kab. Banjar	54.756.883.000	14.180.290.000	40.576.161.000	45.000	54.756.496.000
291	BANJARMASIN	Kab. Barito Kuala	20.550.624.000	9.315.528.000	11.234.672.000	37.000	20.550.237.000
292	BARABAI	Kab. Hulu Sungai Selatan	56.773.877.000	8.979.977.000	47.793.485.000	28.000	56.773.490.000
293	BARABAI	Kab. Hulu Sungai Tengah	13.899.698.000	7.999.996.000	5.899.278.000	37.000	13.899.311.000
294	T A N J U N G	Kab. Hulu Sungai Utara	13.970.787.000	7.396.668.000	6.573.695.000	37.000	13.970.400.000
295	KOTABARU	Kab. Kotabaru	88.355.705.000	17.827.477.000	70.527.804.000	37.000	88.355.318.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	KPPN	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
				PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
296	T A N J U N G	Kab. Tabalong	70.656.402.000	12.443.182.000	58.212.796.000	37.000	70.656.015.000
297	PELAIHARI	Kab. Tanah Laut	112.995.303.000	19.507.847.000	93.487.041.000	28.000	112.994.916.000
298	BARABAI	Kab. Tapin	101.220.167.000	10.014.971.000	91.204.772.000	37.000	101.219.780.000
299	BANJARMASIN	Kota Banjarbaru	31.448.143.000	24.938.658.000	6.509.070.000	28.000	31.447.756.000
300	BANJARMASIN	Kota Banjarmasin	69.380.293.000	62.655.029.000	6.719.292.000	1.349.730	69.375.670.730
301	T A N J U N G	Kab. Balangan	79.307.936.000	14.179.747.000	65.127.765.000	102.790	79.307.614.790
302	KOTABARU	Kab. Tanah Bumbu	243.003.377.000	31.717.291.000	211.285.662.000	37.000	243.002.990.000
303	SAMARINDA	Provinsi Kalimantan Timur	842.798.210.000	355.308.377.000	487.487.452.000	342.000	842.796.171.000
304	TANJUNG REDEP	Kab. Berau	126.751.941.000	42.786.706.000	83.964.911.000	41.000	126.751.658.000
305	SAMARINDA	Kab. Kutai Kartanegara	1.116.981.569.000	78.337.459.000	1.038.643.786.000	41.000	1.116.981.286.000
306	SAMARINDA	Kab. Kutai Barat	270.987.796.000	33.059.376.000	237.928.096.000	302.775	270.987.774.775
307	SAMARINDA	Kab. Kutai Timur	831.286.171.000	74.780.697.000	756.505.150.000	41.000	831.285.888.000
308	BALIKPAPAN	Kab. Paser	104.057.148.000	33.714.109.000	70.342.715.000	41.000	104.056.865.000
309	BALIKPAPAN	Kota Balikpapan	169.861.010.000	148.096.529.000	21.764.127.000	55.000	169.860.711.000
310	SAMARINDA	Kota Bontang	168.236.068.000	63.178.765.000	105.056.979.000	41.000	168.235.785.000
311	SAMARINDA	Kota Samarinda	144.968.171.000	84.873.200.000	60.091.709.000	737.140	144.965.646.140
312	BALIKPAPAN	Kab. Penajam Paser Utara	86.151.543.000	23.575.510.000	62.575.709.000	41.000	86.151.260.000
313	SAMARINDA	Kab. Mahakam Ulu	45.139.923.000	17.506.363.000	27.633.236.000	41.000	45.139.640.000
314	M A N A D O	Provinsi Sulawesi Utara	85.120.827.000	70.242.581.000	14.878.246.000	-	85.120.827.000
315	KOTAMOBAGU	Kab. Bolaang Mongondow	14.513.374.000	4.477.992.000	10.035.382.000	-	14.513.374.000
316	M A N A D O	Kab. Minahasa	15.788.184.000	7.838.381.000	7.949.803.000	-	15.788.184.000
317	T A H U N A	Kab. Sangihe	6.432.063.000	5.129.116.000	1.302.947.000	-	6.432.063.000
318	BITUNG	Kota Bitung	22.089.437.000	7.883.387.000	14.206.050.000	-	22.089.437.000
319	M A N A D O	Kota Manado	44.985.041.000	43.758.591.000	1.226.450.000	-	44.985.041.000
320	BITUNG	Kab. Kepulauan Talaud	4.804.044.000	3.670.130.000	1.133.914.000	-	4.804.044.000
321	M A N A D O	Kab. Minahasa Selatan	6.650.374.000	4.864.407.000	1.785.967.000	-	6.650.374.000
322	M A N A D O	Kota Tomohon	13.346.030.000	4.716.133.000	8.629.897.000	-	13.346.030.000
323	BITUNG	Kab. Minahasa Utara	26.891.426.000	10.618.421.000	16.273.005.000	-	26.891.426.000
324	T A H U N A	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	3.897.764.000	2.945.825.000	951.939.000	-	3.897.764.000
325	KOTAMOBAGU	Kota Kotamobagu	7.878.536.000	6.935.981.000	942.555.000	-	7.878.536.000
326	KOTAMOBAGU	Kab. Bolaang Mongondow Utara	3.974.131.000	2.783.564.000	1.190.567.000	-	3.974.131.000
327	M A N A D O	Kab. Minahasa Tenggara	5.445.954.000	3.654.581.000	1.791.373.000	-	5.445.954.000
328	KOTAMOBAGU	Kab. Bolaang Mongondow Timur	4.499.473.000	3.240.168.000	1.259.305.000	-	4.499.473.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	KPPN	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
				PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
329	KOTAMOBAGU	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	12.214.973.000	2.996.516.000	9.218.457.000	-	12.214.973.000
330	P A L U	Provinsi Sulawesi Tengah	205.089.030.000	117.613.371.000	87.283.892.000	179.368.600	205.076.631.600
331	L U W U K	Kab. Banggai	284.628.267.000	17.653.100.000	266.860.522.000	107.705.925	284.621.327.925
332	L U W U K	Kab. Banggai Kepulauan	9.008.927.000	5.686.715.000	3.302.539.000	18.381.500	9.007.635.500
333	TOLI - TOLI	Kab. Buol	13.177.986.000	5.838.561.000	7.320.960.000	1.245.000	13.160.766.000
334	TOLI - TOLI	Kab. Tolitoli	11.310.284.000	7.346.321.000	3.945.498.000	17.173.500	11.308.992.500
335	P A L U	Kab. Donggala	11.200.263.000	6.218.384.000	4.962.206.000	2.453.000	11.183.043.000
336	P O S O	Kab. Morowali	153.981.219.000	73.364.314.000	80.597.232.000	2.453.000	153.963.999.000
337	P O S O	Kab. Poso	12.179.223.000	8.048.010.000	4.111.540.000	13.215.500	12.172.765.500
338	P A L U	Kota Palu	29.900.425.000	25.508.747.000	4.372.005.000	10.288.100	29.891.040.100
339	P A L U	Kab. Parigi Moutong	12.077.584.000	8.112.478.000	3.774.844.000	177.311.975	12.064.633.975
340	P O S O	Kab. Tojo Una Una	9.077.934.000	5.535.687.000	3.522.574.000	18.381.500	9.076.642.500
341	P A L U	Kab. Sigi	8.842.696.000	5.619.945.000	3.204.286.000	1.245.000	8.825.476.000
342	L U W U K	Kab. Banggai Laut	8.416.327.000	5.454.719.000	2.941.935.000	18.381.500	8.415.035.500
343	P O S O	Kab. Morowali Utara	33.439.301.000	7.495.635.000	25.923.993.000	2.453.000	33.422.081.000
344	MAKASSAR II	Provinsi Sulawesi Selatan	244.022.055.000	221.593.211.000	17.033.866.000	5.394.978.000	244.022.055.000
345	BANTAENG	Kab. Bantaeng	8.281.273.000	7.029.845.000	840.111.000	411.317.000	8.281.273.000
346	PARE - PARE	Kab. Barru	7.621.059.000	6.489.313.000	796.440.000	335.306.000	7.621.059.000
347	WATAMPONE	Kab. Bone	17.425.922.000	11.322.184.000	4.733.459.000	1.370.279.000	17.425.922.000
348	BANTAENG	Kab. Bulukumba	11.496.584.000	7.948.751.000	2.956.319.000	591.514.000	11.496.584.000
349	PARE - PARE	Kab. Enrekang	7.299.099.000	5.787.465.000	1.144.490.000	367.144.000	7.299.099.000
350	MAKASSAR II	Kab. Gowa	14.216.827.000	11.688.330.000	2.166.135.000	362.362.000	14.216.827.000
351	BANTAENG	Kab. Jeneponto	8.204.498.000	6.538.656.000	1.328.668.000	337.174.000	8.204.498.000
352	P A L O P O	Kab. Luwu	8.413.023.000	7.043.277.000	1.066.841.000	302.905.000	8.413.023.000
353	P A L O P O	Kab. Luwu Utara	9.308.864.000	7.244.675.000	1.770.984.000	293.205.000	9.308.864.000
354	MAKASSAR I	Kab. Maros	15.030.037.000	9.953.148.000	4.055.991.000	1.020.898.000	15.030.037.000
355	MAKASSAR I	Kab. Pangkajene Kepulauan	17.846.635.000	9.642.837.000	7.910.593.000	293.205.000	17.846.635.000
356	P A L O P O	Kota Palopo	12.074.931.000	11.078.483.000	703.243.000	293.205.000	12.074.931.000
357	P A L O P O	Kab. Luwu Timur	51.301.128.000	27.395.552.000	23.596.814.000	308.762.000	51.301.128.000
358	PARE - PARE	Kab. Pinrang	7.956.612.000	6.652.986.000	1.010.421.000	293.205.000	7.956.612.000
359	SINJAI	Kab. Sinjai	9.790.204.000	7.059.533.000	922.860.000	1.807.811.000	9.790.204.000
360	BENTENG	Kab. Kepulauan Selayar	7.267.343.000	5.994.267.000	979.871.000	293.205.000	7.267.343.000
361	PARE - PARE	Kab. Sidenreng Rappang	8.531.326.000	7.186.832.000	1.051.289.000	293.205.000	8.531.326.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	KPPN	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
				PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
362	WATAMPONE	Kab. Soppeng	12.573.937.000	7.106.648.000	1.370.977.000	4.096.312.000	12.573.937.000
363	MAKASSAR II	Kab. Takalar	10.473.515.000	7.493.258.000	2.687.052.000	293.205.000	10.473.515.000
364	M A K A L E	Kab. Tana Toraja	7.868.179.000	6.462.891.000	1.112.083.000	293.205.000	7.868.179.000
365	WATAMPONE	Kab. Wajo	29.458.026.000	8.494.689.000	20.648.646.000	314.691.000	29.458.026.000
366	PARE - PARE	Kota Parepare	10.516.249.000	9.554.602.000	668.442.000	285.002.160	10.508.046.160
367	MAKASSAR I	Kota Makassar	163.266.117.000	160.219.721.000	2.730.069.000	316.327.000	163.266.117.000
368	M A K A L E	Kab. Toraja Utara	7.397.091.000	6.135.701.000	968.185.000	293.205.000	7.397.091.000
369	K E N D A R I	Provinsi Sulawesi Tenggara	76.922.287.000	56.021.723.000	20.900.336.000	147.000	76.922.206.000
370	B A U - B A U	Kab. Buton	5.031.227.000	3.387.756.000	1.643.463.000	1.000	5.031.220.000
371	K E N D A R I	Kab. Konawe	10.465.410.000	5.558.516.000	4.906.878.000	9.000	10.465.403.000
372	K O L A K A	Kab. Kolaka	39.530.715.000	12.446.692.000	27.084.007.000	9.000	39.530.708.000
373	R A H A	Kab. Muna	5.026.274.000	3.768.368.000	1.257.898.000	1.000	5.026.267.000
374	K E N D A R I	Kota Kendari	33.375.650.000	32.189.171.000	1.186.341.000	9.000	33.375.521.000
375	B A U - B A U	Kota Bau-bau	6.021.878.000	4.948.664.000	1.073.206.000	1.000	6.021.871.000
376	K E N D A R I	Kab. Konawe Selatan	20.391.759.000	4.000.360.000	16.391.383.000	9.000	20.391.752.000
377	K E N D A R I	Kab. Bombana	15.745.403.000	4.701.752.000	11.043.635.000	9.000	15.745.396.000
378	B A U - B A U	Kab. Wakatobi	3.570.420.000	2.437.133.000	1.133.279.000	1.000	3.570.413.000
379	K O L A K A	Kab. Kolaka Utara	6.071.879.000	2.985.708.000	3.086.155.000	12.185	6.071.875.185
380	K E N D A R I	Kab. Konawe Utara	47.853.406.000	3.423.392.000	44.429.998.000	9.000	47.853.399.000
381	B A U - B A U	Kab. Buton Utara	3.344.781.000	2.034.466.000	1.310.307.000	1.000	3.344.774.000
382	K E N D A R I	Kab. Konawe Kepulauan	3.311.262.000	1.919.650.000	1.391.604.000	1.000	3.311.255.000
383	K O L A K A	Kab. Kolaka Timur	3.905.171.000	2.234.496.000	1.670.659.000	9.000	3.905.164.000
384	R A H A	Kab. Muna Barat	3.296.775.000	2.153.565.000	1.143.202.000	1.000	3.296.768.000
385	B A U - B A U	Kab. Buton Tengah	9.385.902.000	2.391.916.000	6.993.978.000	7.475	9.385.901.475
386	B A U - B A U	Kab. Buton Selatan	3.288.988.000	1.930.819.000	1.358.161.000	1.000	3.288.981.000
387	D E N P A S A R	Provinsi Bali	171.454.090.000	168.033.919.000	2.004.114.000	1.317.016.200	171.355.049.200
388	D E N P A S A R	Kab. Badung	70.266.313.000	69.024.049.000	619.433.000	579.269.425	70.222.751.425
389	AMLAPURA	Kab. Bangli	12.805.443.000	12.032.618.000	530.648.000	232.014.110	12.795.280.110
390	SINGARAJA	Kab. Buleleng	23.315.730.000	21.627.092.000	1.077.234.000	568.641.625	23.272.967.625
391	D E N P A S A R	Kab. Gianyar	21.243.938.000	20.106.399.000	642.444.000	481.243.970	21.230.086.970
392	SINGARAJA	Kab. Jembrana	17.159.979.000	12.927.352.000	3.820.682.000	394.657.845	17.142.691.845
393	AMLAPURA	Kab. Karangasem	14.884.755.000	13.779.747.000	824.036.000	280.972.000	14.884.755.000
394	AMLAPURA	Kab. Klungkung	13.839.118.000	13.166.409.000	451.450.000	211.973.925	13.829.832.925

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	KPPN	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
				PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
395	D E N P A S A R	Kab. Tabanan	19.380.345.000	18.098.444.000	1.040.348.000	224.658.500	19.363.450.500
396	D E N P A S A R	Kota Denpasar	104.963.533.000	102.467.966.000	1.612.606.000	861.505.210	104.942.077.210
397	M A T A R A M	Provinsi Nusa Tenggara Barat	246.770.313.000	67.489.184.000	35.689.981.000	143.591.148.000	246.770.313.000
398	B I M A	Kab. Bima	27.621.993.000	5.505.525.000	3.270.850.000	18.845.618.000	27.621.993.000
399	B I M A	Kab. Dompu	29.023.442.000	5.510.614.000	3.260.594.000	20.252.234.000	29.023.442.000
400	M A T A R A M	Kab. Lombok Barat	32.019.755.000	8.105.593.000	2.983.574.000	20.930.588.000	32.019.755.000
401	M A T A R A M	Kab. Lombok Tengah	89.655.213.000	10.165.342.000	3.194.049.000	76.295.822.000	89.655.213.000
402	S E L O N G	Kab. Lombok Timur	97.855.562.000	10.286.851.000	3.601.067.000	83.967.644.000	97.855.562.000
403	SUMBAWA BESAR	Kab. Sumbawa	35.472.721.000	8.921.996.000	6.035.052.000	20.515.673.000	35.472.721.000
404	M A T A R A M	Kota Mataram	119.552.997.000	41.082.875.000	2.486.533.000	75.983.589.000	119.552.997.000
405	B I M A	Kota Bima	28.635.929.000	7.486.059.000	2.338.466.000	18.811.404.000	28.635.929.000
406	SUMBAWA BESAR	Kab. Sumbawa Barat	195.500.911.000	18.754.017.000	157.648.599.000	19.098.295.000	195.500.911.000
407	M A T A R A M	Kab. Lombok Utara	25.854.540.000	4.579.514.000	2.411.420.000	18.863.606.000	25.854.540.000
408	K U P A N G	Provinsi Nusa Tenggara Timur	58.329.358.000	52.567.961.000	3.919.037.000	1.842.360.000	58.329.358.000
409	K U P A N G	Kab. Alor	3.092.490.000	2.248.318.000	695.422.000	144.588.490	3.088.328.490
410	ATAMBUA	Kab. Belu	3.848.831.000	3.182.468.000	515.841.000	150.522.000	3.848.831.000
411	E N D E	Kab. Ende	6.575.665.000	4.657.048.000	1.786.254.000	128.659.950	6.571.961.950
412	LARANTUKA	Kab. Flores Timur	4.745.581.000	3.275.543.000	690.491.000	779.547.000	4.745.581.000
413	K U P A N G	Kab. Kupang	4.660.001.000	3.583.608.000	899.851.000	176.542.000	4.660.001.000
414	LARANTUKA	Kab. Lembata	2.566.966.000	1.886.565.000	525.129.000	155.272.000	2.566.966.000
415	R U T E N G	Kab. Manggarai	6.202.079.000	3.622.851.000	1.972.632.000	589.625.570	6.185.108.570
416	R U T E N G	Kab. Ngada	3.057.983.000	2.186.834.000	746.171.000	124.978.000	3.057.983.000
417	E N D E	Kab. Sikka	5.866.969.000	4.772.048.000	733.968.000	350.854.790	5.856.870.790
418	WAINGAPU	Kab. Sumba Barat	3.037.590.000	2.356.907.000	541.898.000	138.785.000	3.037.590.000
419	WAINGAPU	Kab. Sumba Timur	7.164.085.000	4.130.183.000	2.820.821.000	213.081.000	7.164.085.000
420	K U P A N G	Kab. Timor Tengah Selatan	3.577.762.000	2.522.821.000	875.852.000	179.089.000	3.577.762.000
421	ATAMBUA	Kab. Timor Tengah Utara	3.489.790.000	2.637.536.000	705.830.000	136.182.900	3.479.548.900
422	K U P A N G	Kota Kupang	24.327.142.000	23.665.044.000	552.434.000	109.664.000	24.327.142.000
423	K U P A N G	Kab. Rote Ndao	2.737.645.000	2.002.321.000	580.263.000	155.061.000	2.737.645.000
424	R U T E N G	Kab. Manggarai Barat	4.567.883.000	3.619.960.000	709.154.000	238.769.000	4.567.883.000
425	E N D E	Kab. Nagekeo	2.701.987.000	1.946.096.000	631.611.000	124.280.000	2.701.987.000
426	WAINGAPU	Kab. Sumba Barat Daya	3.576.748.000	2.174.856.000	894.417.000	507.475.000	3.576.748.000
427	WAINGAPU	Kab. Sumba Tengah	2.241.693.000	1.532.355.000	592.144.000	117.194.000	2.241.693.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	KPPN	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
				PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
428	R U T E N G	Kab. Manggarai Timur	3.178.034.000	2.277.415.000	722.173.000	178.446.000	3.178.034.000
429	K U P A N G	Kab. Sabu Raijua	2.166.984.000	1.580.761.000	443.342.000	138.883.680	2.162.986.680
430	ATAMBUA	Kab. Malaka	2.646.506.000	1.883.993.000	582.694.000	179.819.000	2.646.506.000
431	A M B O N	Provinsi Maluku	33.715.181.000	26.892.816.000	6.822.365.000	-	33.715.181.000
432	SAUMLAKI	Kab. Kepulauan Tanimbar	4.530.391.000	2.469.416.000	2.060.975.000	-	4.530.391.000
433	M A S O H I	Kab. Maluku Tengah	6.941.670.000	4.886.153.000	2.055.517.000	-	6.941.670.000
434	T U A L	Kab. Maluku Tenggara	3.190.735.000	2.399.887.000	790.848.000	-	3.190.735.000
435	A M B O N	Kab. Buru	4.498.923.000	2.147.202.000	2.351.721.000	-	4.498.923.000
436	A M B O N	Kota Ambon	21.199.717.000	20.415.565.000	784.152.000	-	21.199.717.000
437	M A S O H I	Kab. Seram Bagian Barat	3.667.343.000	2.361.060.000	1.306.283.000	-	3.667.343.000
438	M A S O H I	Kab. Seram Bagian Timur	19.296.490.000	1.974.759.000	17.321.731.000	-	19.296.490.000
439	T U A L	Kab. Kepulauan Aru	3.590.771.000	2.372.329.000	1.218.442.000	-	3.590.771.000
440	T U A L	Kota Tual	2.754.591.000	1.954.718.000	799.873.000	-	2.754.591.000
441	SAUMLAKI	Kab. Maluku Barat Daya	9.082.473.000	3.915.344.000	5.167.129.000	-	9.082.473.000
442	A M B O N	Kab. Buru Selatan	3.909.125.000	1.364.982.000	2.544.143.000	-	3.909.125.000
443	JAYAPURA	Provinsi Papua	124.904.698.000	89.029.382.000	35.875.316.000	-	124.904.698.000
444	B I A K	Kab. Biak Numfor	10.975.940.000	7.405.564.000	3.570.376.000	-	10.975.940.000
445	JAYAPURA	Kab. Jayapura	15.355.458.000	7.170.787.000	8.184.671.000	-	15.355.458.000
446	W A M E N A	Kab. Jayawijaya	10.383.638.000	6.838.078.000	3.545.560.000	-	10.383.638.000
447	MERAUKE	Kab. Merauke	36.233.122.000	12.122.425.000	24.110.697.000	-	36.233.122.000
448	T I M I K A	Kab. Mimika	788.154.700.000	205.269.391.000	582.885.309.000	-	788.154.700.000
449	N A B I R E	Kab. Nabire	14.327.768.000	6.213.839.000	8.113.929.000	-	14.327.768.000
450	N A B I R E	Kab. Paniai	8.393.692.000	4.789.111.000	3.604.581.000	-	8.393.692.000
451	W A M E N A	Kab. Puncak Jaya	9.694.478.000	5.914.962.000	3.779.516.000	-	9.694.478.000
452	S E R U I	Kab. Kepulauan Yapen	9.537.596.000	5.862.799.000	3.674.797.000	-	9.537.596.000
453	JAYAPURA	Kota Jayapura	83.520.444.000	79.969.838.000	3.550.606.000	-	83.520.444.000
454	JAYAPURA	Kab. Sarmi	12.743.386.000	5.190.521.000	7.552.865.000	-	12.743.386.000
455	JAYAPURA	Kab. Keerom	13.240.318.000	4.828.510.000	8.411.808.000	-	13.240.318.000
456	W A M E N A	Kab. Yahukimo	10.480.868.000	5.867.255.000	4.613.613.000	-	10.480.868.000
457	JAYAPURA	Kab. Pegunungan Bintang	10.052.735.000	5.574.308.000	4.478.427.000	-	10.052.735.000
458	W A M E N A	Kab. Tolikara	9.708.444.000	5.926.399.000	3.782.045.000	-	9.708.444.000
459	MERAUKE	Kab. Boven Digoel	17.391.585.000	6.468.071.000	10.923.514.000	-	17.391.585.000
460	MERAUKE	Kab. Mappi	10.992.060.000	5.549.253.000	5.442.807.000	-	10.992.060.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	KPPN	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
				PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
461	MERAUKE	Kab. Asmat	9.966.853.000	5.337.609.000	4.629.244.000	-	9.966.853.000
462	S E R U I	Kab. Waropen	9.594.575.000	4.948.495.000	4.646.080.000	-	9.594.575.000
463	B I A K	Kab. Supiori	8.474.590.000	4.967.725.000	3.506.865.000	-	8.474.590.000
464	JAYAPURA	Kab. Mamberamo Raya	9.988.557.000	4.711.607.000	5.276.950.000	-	9.988.557.000
465	W A M E N A	Kab. Mamberamo Tengah	8.548.659.000	5.011.231.000	3.537.428.000	-	8.548.659.000
466	W A M E N A	Kab. Yalimo	8.668.360.000	5.199.216.000	3.469.144.000	-	8.668.360.000
467	W A M E N A	Kab. Lanny Jaya	8.513.767.000	5.044.476.000	3.469.291.000	-	8.513.767.000
468	W A M E N A	Kab. Nduga	8.470.187.000	4.713.669.000	3.756.518.000	-	8.470.187.000
469	N A B I R E	Kab. Dogiyai	8.638.198.000	4.808.182.000	3.830.016.000	-	8.638.198.000
470	T I M I K A	Kab. Puncak	9.488.300.000	5.384.286.000	4.104.014.000	-	9.488.300.000
471	N A B I R E	Kab. Intan Jaya	9.046.563.000	4.986.797.000	4.059.766.000	-	9.046.563.000
472	N A B I R E	Kab. Deiyai	9.542.116.000	4.724.363.000	4.817.753.000	-	9.542.116.000
473	T E R N A T E	Provinsi Maluku Utara	101.772.569.000	64.987.695.000	36.784.874.000	-	101.772.569.000
474	T E R N A T E	Kab. Halmahera Tengah	113.924.478.000	44.894.559.000	69.029.919.000	-	113.924.478.000
475	T E R N A T E	Kota Ternate	16.980.184.000	14.408.897.000	2.571.287.000	-	16.980.184.000
476	T E R N A T E	Kab. Halmahera Barat	7.629.998.000	4.539.430.000	3.090.568.000	-	7.629.998.000
477	TOBELO	Kab. Halmahera Timur	120.308.279.000	5.463.185.000	114.845.094.000	-	120.308.279.000
478	T E R N A T E	Kab. Halmahera Selatan	36.764.862.000	19.603.693.000	17.161.169.000	-	36.764.862.000
479	TOBELO	Kab. Halmahera Utara	22.257.386.000	9.275.599.000	12.981.787.000	-	22.257.386.000
480	T E R N A T E	Kab. Kepulauan Sula	8.579.102.000	4.469.123.000	4.109.979.000	-	8.579.102.000
481	T E R N A T E	Kota Tidore Kepulauan	11.350.837.000	8.463.041.000	2.887.796.000	-	11.350.837.000
482	TOBELO	Kab. Pulau Morotai	6.355.723.000	3.624.358.000	2.731.365.000	-	6.355.723.000
483	T E R N A T E	Kab. Pulau Taliabu	11.731.329.000	4.047.007.000	7.684.322.000	-	11.731.329.000
484	S E R A N G	Provinsi Banten	961.593.238.000	951.164.029.000	10.215.212.000	28.473.000	961.407.714.000
485	RANGKASBITUNG	Kab. Lebak	80.954.844.000	67.018.936.000	13.898.232.000	4.546.000	80.921.714.000
486	RANGKASBITUNG	Kab. Pandeglang	79.958.540.000	65.440.483.000	14.482.531.000	2.396.000	79.925.410.000
487	S E R A N G	Kab. Serang	131.330.908.000	126.420.913.000	4.872.319.000	4.546.000	131.297.778.000
488	TANGERANG	Kab. Tangerang	394.558.055.000	390.577.413.000	3.884.211.000	9.474.000	394.471.098.000
489	S E R A N G	Kota Cilegon	152.347.593.000	151.216.473.000	1.095.594.000	2.396.000	152.314.463.000
490	TANGERANG	Kota Tangerang	351.689.870.000	348.745.207.000	2.866.489.000	8.954.000	351.620.650.000
491	S E R A N G	Kota Serang	100.528.294.000	99.405.507.000	1.087.261.000	2.396.000	100.495.164.000
492	TANGERANG	Kota Tangerang Selatan	294.178.456.000	291.489.253.000	2.470.019.000	30.813.000	293.990.085.000
493	PANGKAL PINANG	Provinsi Bangka Belitung	72.509.036.000	50.171.649.000	22.337.387.000	-	72.509.036.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	KPPN	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
				PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
494	PANGKAL PINANG	Kab. Bangka	43.259.412.000	10.946.997.000	32.312.415.000	-	43.259.412.000
495	TANJUNG PANDAN	Kab. Belitung	21.622.540.000	9.957.537.000	11.665.003.000	-	21.622.540.000
496	PANGKAL PINANG	Kota Pangkal Pinang	33.667.031.000	30.863.857.000	2.803.174.000	-	33.667.031.000
497	PANGKAL PINANG	Kab. Bangka Selatan	30.437.280.000	5.882.957.000	24.554.323.000	-	30.437.280.000
498	PANGKAL PINANG	Kab. Bangka Tengah	16.974.038.000	7.084.778.000	9.889.260.000	-	16.974.038.000
499	PANGKAL PINANG	Kab. Bangka Barat	51.578.956.000	11.430.979.000	40.147.977.000	-	51.578.956.000
500	TANJUNG PANDAN	Kab. Belitung Timur	20.772.625.000	8.375.239.000	12.397.386.000	-	20.772.625.000
501	GORONTALO	Provinsi Gorontalo	23.468.008.000	20.868.362.000	2.599.436.000	47.320	23.467.845.320
502	MARISA	Kab. Boalemo	7.686.162.000	2.688.959.000	4.997.150.000	4.000	7.686.113.000
503	GORONTALO	Kab. Gorontalo	8.676.118.000	6.958.589.000	1.717.214.000	70.980	8.675.873.980
504	GORONTALO	Kota Gorontalo	12.731.191.000	12.257.028.000	474.110.000	4.000	12.731.142.000
505	MARISA	Kab. Pohuwato	7.104.829.000	4.329.347.000	2.775.429.000	4.000	7.104.780.000
506	GORONTALO	Kab. Bone Bolango	6.796.364.000	6.094.394.000	701.917.000	4.000	6.796.315.000
507	GORONTALO	Kab. Gorontalo Utara	4.590.358.000	2.896.253.000	1.694.052.000	12.330	4.590.317.330
508	TANJUNG PINANG	Provinsi Kepulauan Riau	230.146.628.000	182.959.037.000	47.147.030.000	37.724.125	230.143.791.125
509	TANJUNG PINANG	Kab. Natuna	138.058.918.000	16.447.646.000	121.602.216.000	8.464.925	138.058.326.925
510	TANJUNG PINANG	Kab. Kepulauan Anambas	92.205.880.000	22.271.115.000	69.925.709.000	4.879.070	92.201.703.070
511	B A T A M	Kab. Karimun	60.642.558.000	36.790.303.000	23.843.804.000	4.274.070	60.638.381.070
512	B A T A M	Kota Batam	179.080.822.000	175.447.780.000	3.567.352.000	61.434.425	179.076.566.425
513	TANJUNG PINANG	Kota Tanjung Pinang	29.121.185.000	26.693.914.000	2.418.820.000	7.859.925	29.120.593.925
514	TANJUNG PINANG	Kab. Lingga	18.363.478.000	14.967.637.000	3.387.390.000	4.274.070	18.359.301.070
515	TANJUNG PINANG	Kab. Bintan	27.975.489.000	23.677.768.000	4.289.270.000	8.214.570	27.975.252.570
516	MANOKWARI	Provinsi Papua Barat	152.359.524.000	32.356.867.000	120.002.657.000	-	152.359.524.000
517	FAK - FAK	Kab. Fak Fak	42.518.291.000	3.681.956.000	38.836.335.000	-	42.518.291.000
518	MANOKWARI	Kab. Manokwari	24.095.642.000	14.578.750.000	9.516.892.000	-	24.095.642.000
519	S O R O N G	Kab. Sorong	104.731.688.000	8.590.223.000	96.141.465.000	-	104.731.688.000
520	S O R O N G	Kota Sorong	20.285.984.000	12.906.268.000	7.379.716.000	-	20.285.984.000
521	S O R O N G	Kab. Raja Ampat	31.982.868.000	3.610.240.000	28.372.628.000	-	31.982.868.000
522	S O R O N G	Kab. Sorong Selatan	11.471.050.000	2.641.775.000	8.829.275.000	-	11.471.050.000
523	MANOKWARI	Kab. Teluk Bintuni	713.829.982.000	35.304.117.000	678.525.865.000	-	713.829.982.000
524	MANOKWARI	Kab. Teluk Wondama	12.783.042.000	2.805.180.000	9.977.862.000	-	12.783.042.000
525	FAK - FAK	Kab. Kaimana	15.977.500.000	3.421.485.000	12.556.015.000	-	15.977.500.000
526	S O R O N G	Kab. Maybrat	10.988.541.000	2.745.930.000	8.242.611.000	-	10.988.541.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	KPPN	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
				PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
527	S O R O N G	Kab. Tambrauw	10.168.298.000	2.207.362.000	7.960.936.000	-	10.168.298.000
528	MANOKWARI	Kab. Manokwari Selatan	11.149.660.000	2.748.854.000	8.400.806.000	-	11.149.660.000
529	MANOKWARI	Kab. Pegunungan Arfak	11.370.851.000	2.876.973.000	8.493.878.000	-	11.370.851.000
530	MAMUJU	Provinsi Sulawesi Barat	17.097.205.000	14.225.106.000	2.872.099.000	-	17.097.205.000
531	M A J E N E	Kab. Majene	3.889.337.000	3.158.708.000	730.629.000	-	3.889.337.000
532	MAMUJU	Kab. Mamuju	11.723.489.000	9.377.405.000	2.346.084.000	-	11.723.489.000
533	M A J E N E	Kab. Polewali Mandar	5.693.881.000	4.682.854.000	1.011.027.000	-	5.693.881.000
534	M A J E N E	Kab. Mamasa	2.754.154.000	1.850.625.000	903.529.000	-	2.754.154.000
535	MAMUJU	Kab. Pasangkayu	10.687.373.000	2.709.149.000	7.978.224.000	-	10.687.373.000
536	MAMUJU	Kab. Mamuju Tengah	3.709.297.000	1.881.233.000	1.828.064.000	-	3.709.297.000
537	TANJUNG SELOR	Provinsi Kalimantan Utara	132.145.647.000	31.544.406.000	100.601.213.000	28.000	132.145.647.000
538	MERAUKE	Provinsi Papua Tengah	92.378.244.000	66.962.251.000	25.415.993.000	-	92.378.244.000
539	N A B I R E	Provinsi Papua Selatan	75.170.276.000	25.661.193.000	49.509.083.000	-	75.170.276.000
540	W A M E N A	Provinsi Papua Pegunungan	94.915.592.000	72.482.136.000	22.433.456.000	-	94.915.592.000
541	S O R O N G	Provinsi Papua Barat Daya	77.758.158.000	24.972.648.000	52.785.510.000	-	77.758.158.000
542	TANJUNG SELOR	Kab. Bulungan	132.422.257.000	15.288.295.000	117.133.955.000	7.000	132.422.257.000
543	TANJUNG SELOR	Kab. Malinau	103.961.630.000	6.848.676.000	97.112.947.000	7.000	103.961.630.000
544	NUNUKAN	Kab. Nunukan	61.967.676.000	7.441.206.000	54.526.463.000	7.000	61.967.676.000
545	T A R A K A N	Kota Tarakan	117.157.104.000	17.301.381.000	99.855.723.000	-	117.157.104.000
546	T A R A K A N	Kab. Tana Tidung	145.835.139.000	4.804.064.000	141.031.068.000	7.000	145.835.139.000
Jumlah			69.814.195.396.000	41.526.659.300.000	22.319.338.323.000	5.876.010.795.530	69.722.008.418.530

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi							
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)=(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)
1	Provinsi Aceh	344.841.090.000	138.452.631.000	27.831.837.000	143.602.383.000	311.676.000	537.382.100	-	33.249.623.000	344.841.090.000
2	Kab. Aceh Barat	220.708.463.000	519.596.000	120.785.000	210.123.214.000	19.575.000	-	1.657.396.000	8.223.336.000	220.673.029.050
3	Kab. Aceh Besar	16.539.955.000	519.596.000	120.785.000	9.166.803.000	550.589.000	-	2.775.670.000	3.387.598.000	16.537.120.900
4	Kab. Aceh Selatan	18.535.412.000	519.596.000	120.785.000	9.394.030.000	13.325.000	-	2.459.599.000	5.994.050.000	18.512.950.750
5	Kab. Aceh Singkil	22.964.100.000	500.066.000	111.122.000	8.680.068.000	12.284.000	-	3.408.974.000	10.233.010.000	22.948.329.100
6	Kab. Aceh Tengah	27.742.152.000	727.777.000	340.213.000	21.168.269.000	18.534.000	50.393.700	1.233.134.000	4.046.570.000	27.742.152.000
7	Kab. Aceh Tenggara	16.123.095.000	553.687.000	179.595.000	8.680.068.000	12.284.000	16.033.200	1.233.134.000	5.410.863.000	16.123.095.000
8	Kab. Aceh Timur	31.011.724.000	5.473.712.000	3.630.135.000	9.897.851.000	19.314.000	-	2.033.036.000	9.797.700.000	30.904.277.200
9	Kab. Aceh Utara	27.820.674.000	6.005.952.000	3.440.266.000	8.672.693.000	12.284.000	-	1.544.806.000	8.093.341.000	27.777.058.800
10	Kab. Bireuen	17.508.203.000	685.399.000	335.711.000	8.902.829.000	13.064.000	-	1.735.332.000	5.806.748.000	17.503.838.000
11	Kab. Pidie	25.586.896.000	514.714.000	118.369.000	19.499.483.000	78.002.000	-	1.690.148.000	3.649.530.000	25.582.063.000
12	Kab. Simeulue	17.629.677.000	519.596.000	120.785.000	8.979.541.000	13.325.000	12.820.500	4.452.785.000	3.500.874.000	17.629.677.000
13	Kota Banda Aceh	12.296.814.000	500.066.000	111.122.000	8.672.693.000	67.378.000	1.622.550	1.302.640.000	1.632.078.000	12.296.814.000
14	Kota Sabang	11.675.779.000	519.596.000	120.785.000	8.979.541.000	13.018.000	3.454.800	2.031.303.000	-	11.675.779.000
15	Kota Langsa	17.619.499.000	1.194.476.000	340.213.000	8.672.693.000	12.284.000	-	1.301.377.000	6.044.201.000	17.586.205.350
16	Kota Lhokseumawe	16.218.110.000	660.303.000	315.158.000	8.672.693.000	12.284.000	9.475.700	1.347.390.000	5.195.684.000	16.218.110.000
17	Kab. Gayo Lues	19.204.279.000	1.248.096.000	408.686.000	11.070.151.000	12.284.000	30.924.300	1.233.134.000	5.128.762.000	19.204.279.000
18	Kab. Aceh Barat Daya	25.562.080.000	514.714.000	118.369.000	17.224.998.000	19.314.000	-	1.595.563.000	6.055.050.000	25.537.243.000
19	Kab. Aceh Jaya	29.575.454.000	519.596.000	120.785.000	19.982.337.000	79.461.000	14.271.900	2.246.110.000	6.576.265.000	29.575.454.000
20	Kab. Nagan Raya	84.904.698.000	519.596.000	120.785.000	70.685.220.000	19.575.000	13.283.100	1.801.316.000	11.708.996.000	84.873.704.100
21	Kab. Aceh Tamiang	26.839.908.000	6.702.628.000	435.339.000	8.943.820.000	13.064.000	43.945.200	1.618.593.000	9.049.699.000	26.839.908.000
22	Kab. Bener Meriah	16.228.164.000	941.275.000	591.574.000	8.979.541.000	13.325.000	-	1.340.364.000	4.305.225.000	16.220.117.550
23	Kab. Pidie Jaya	16.012.323.000	500.066.000	111.122.000	8.672.693.000	12.284.000	7.237.750	1.396.303.000	5.308.700.000	16.012.323.000
24	Kota Subulussalam	18.076.940.000	514.714.000	118.369.000	9.068.077.000	13.064.000	-	1.313.556.000	7.025.546.000	18.056.914.850
25	Provinsi Sumatera Utara	149.873.847.000	354.419.000	291.755.000	57.704.838.000	5.273.063.000	5.902.219.500	-	74.861.392.000	149.873.847.000
26	Kab. Asahan	22.204.671.000	21.149.000	14.841.000	1.955.236.000	118.515.000	-	1.596.784.000	18.273.604.000	22.014.178.350
27	Kab. Dairi	12.667.783.000	21.149.000	14.841.000	2.546.921.000	118.515.000	57.664.200	1.259.941.000	8.513.744.000	12.667.783.000
28	Kab. Deli Serdang	13.416.125.000	82.626.000	84.802.000	1.955.081.000	118.515.000	116.644.450	1.497.040.000	9.498.198.000	13.416.125.000
29	Kab. Karo	11.904.237.000	76.196.000	84.802.000	1.952.893.000	118.515.000	143.872.800	1.259.941.000	7.931.896.000	11.568.533.800
30	Kab. Labuhanbatu	40.609.494.000	24.065.870.000	36.737.000	3.820.174.000	128.175.000	-	1.522.712.000	10.579.839.000	40.250.894.300
31	Kab. Langkat	20.886.187.000	1.500.272.000	1.000.146.000	2.050.879.000	123.327.000	-	1.794.390.000	14.208.953.000	20.886.187.000
32	Kab. Mandailing Natal	36.964.511.000	22.001.000	15.788.000	10.606.030.000	13.523.697.000	526.222.450	2.428.022.000	9.543.279.000	36.964.511.000
33	Kab. Nias	8.942.951.000	21.149.000	14.841.000	1.952.893.000	118.515.000	83.064.900	1.804.973.000	4.753.287.000	8.942.951.000
34	Kab. Simalungun	21.227.613.000	21.410.000	14.841.000	1.953.727.000	118.515.000	-	1.259.941.000	17.244.179.000	20.705.829.450
35	Kab. Tapanuli Selatan	122.142.849.000	21.149.000	14.841.000	107.385.021.000	1.051.111.000	161.964.900	1.349.982.000	11.780.293.000	122.142.849.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	20.054.039.000	21.149.000	14.841.000	8.001.920.000	118.515.000	46.633.500	2.970.763.000	8.770.996.000	20.054.039.000
37	Kab. Tapanuli Utara	17.382.260.000	21.149.000	14.841.000	7.757.154.000	118.515.000	106.758.300	1.259.941.000	7.853.833.000	17.382.260.000
38	Kab. Toba Samosir	11.523.734.000	21.433.000	15.156.000	1.995.053.000	120.920.000	132.711.000	1.286.749.000	7.641.338.000	11.523.734.000
39	Kota Binjai	11.513.424.000	76.196.000	84.802.000	1.952.893.000	118.515.000	69.811.300	1.259.941.000	7.913.265.000	11.513.424.000
40	Kota Medan	7.824.170.000	45.148.000	36.737.000	3.820.029.000	128.175.000	34.873.200	1.292.223.000	2.346.320.000	7.824.170.000
41	Kota Pematang Siantar	6.288.811.000	21.149.000	14.841.000	1.952.893.000	118.515.000	41.386.800	1.259.941.000	2.783.103.000	6.288.811.000
42	Kota Sibolga	5.896.935.000	21.149.000	14.841.000	1.952.893.000	118.515.000	31.159.500	1.275.427.000	2.409.835.000	5.896.935.000
43	Kota Tanjung Balai	6.623.250.000	21.149.000	14.841.000	1.952.893.000	118.515.000	31.791.900	1.259.941.000	3.149.528.000	6.623.250.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi							
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)=(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)
44	Kota Tebing Tinggi	6.317.354.000	21.433.000	15.156.000	1.994.445.000	120.920.000	31.809.900	1.286.749.000	2.772.208.000	6.317.354.000
45	Kota Padang Sidempuan	16.829.171.000	21.149.000	14.841.000	7.476.790.000	118.515.000	33.462.900	1.259.941.000	7.825.982.000	16.829.171.000
46	Kab. Pakpak Bharat	7.953.132.000	21.149.000	14.841.000	2.032.558.000	118.515.000	71.240.700	1.259.941.000	4.220.513.000	7.953.132.000
47	Kab. Nias Selatan	20.220.617.000	21.149.000	14.841.000	1.952.893.000	118.515.000	238.818.600	5.388.361.000	11.925.812.000	20.220.617.000
48	Kab. Humbang Hasundutan	9.755.469.000	21.149.000	14.841.000	1.952.893.000	118.515.000	100.915.500	1.259.941.000	5.880.980.000	9.755.469.000
49	Kab. Serdang Bedagai	14.554.428.000	21.410.000	14.841.000	1.953.007.000	118.515.000	40.631.700	1.762.081.000	10.548.725.000	14.554.428.000
50	Kab. Samosir	6.870.004.000	21.149.000	14.841.000	1.952.893.000	118.515.000	107.235.300	1.259.941.000	2.939.447.000	6.870.004.000
51	Kab. Batu Bara	14.236.247.000	21.149.000	14.841.000	1.952.893.000	118.515.000	89.414.650	1.870.398.000	10.120.480.000	14.236.247.000
52	Kab. Padang Lawas	27.512.342.000	564.972.000	14.841.000	7.476.790.000	1.051.111.000	614.932.800	1.259.941.000	14.804.342.000	27.512.342.000
53	Kab. Padang Lawas Utara	47.099.332.000	24.585.955.000	14.841.000	8.521.235.000	128.175.000	357.391.200	1.259.941.000	10.841.558.000	47.099.332.000
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	47.453.750.000	25.088.607.000	37.368.000	3.904.173.000	132.987.000	399.583.200	1.313.556.000	15.642.224.000	47.453.750.000
55	Kab. Labuhanbatu Utara	26.508.293.000	21.149.000	14.841.000	7.501.324.000	118.515.000	192.282.600	1.364.374.000	16.846.713.000	26.508.293.000
56	Kab. Nias Utara	15.984.361.000	21.149.000	14.841.000	1.953.006.000	118.515.000	31.146.900	2.599.021.000	11.173.596.000	15.984.361.000
57	Kab. Nias Barat	8.976.101.000	21.149.000	14.841.000	1.952.893.000	118.515.000	83.064.900	1.838.123.000	4.753.287.000	8.976.101.000
58	Kota Gunungsitoli	6.712.181.000	21.149.000	14.841.000	1.952.893.000	118.515.000	31.146.900	1.367.217.000	3.133.333.000	6.712.181.000
59	Provinsi Sumatera Barat	74.284.533.000	-	-	23.671.163.000	7.887.063.000	6.352.891.050	-	32.052.337.000	74.284.533.000
60	Kab. Lima Puluh Kota	28.665.288.000	16.826.844.000	1.020.350.000	1.662.323.000	524.988.000	137.305.200	1.313.556.000	6.859.359.000	28.665.288.000
61	Kab. Agam	12.686.444.000	-	-	1.678.249.000	307.798.000	-	1.490.678.000	9.122.414.000	12.612.388.600
62	Kab. Kepulauan Mentawai	13.566.201.000	-	-	1.766.152.000	533.059.000	1.228.219.800	7.170.332.000	-	13.566.201.000
63	Kab. Padang Pariaman	9.547.210.000	-	-	1.858.353.000	331.141.000	27.417.900	1.618.938.000	5.647.192.000	9.547.210.000
64	Kab. Pasaman	12.285.005.000	578.536.000	-	1.770.674.000	1.323.927.000	124.669.500	1.340.364.000	6.855.758.000	12.285.005.000
65	Kab. Pesisir Selatan	18.082.013.000	-	-	2.173.350.000	1.742.279.000	37.446.300	3.569.817.000	10.471.556.000	18.082.013.000
66	Kab. Sijunjung	38.423.366.000	16.591.714.000	1.041.174.000	11.585.412.000	568.880.000	224.566.500	1.340.364.000	6.546.848.000	38.423.366.000
67	Kab. Solok	19.829.777.000	-	-	10.016.992.000	2.393.627.000	-	1.340.364.000	5.756.739.000	19.654.187.400
68	Kab. Tanah Datar	12.658.340.000	-	-	5.463.018.000	337.378.000	29.160.000	1.313.556.000	5.447.007.000	12.658.340.000
69	Kota Bukit Tinggi	5.415.675.000	-	-	1.672.952.000	307.798.000	24.207.600	1.233.134.000	2.120.919.000	5.415.675.000
70	Kota Padang Panjang	5.174.488.000	-	-	1.672.952.000	307.798.000	24.220.500	1.233.134.000	1.879.689.000	5.174.488.000
71	Kota Padang	10.633.733.000	-	-	2.220.299.000	543.928.000	30.747.000	2.080.020.000	5.686.816.000	10.633.733.000
72	Kota Payakumbuh	5.377.878.000	-	-	1.745.983.000	325.802.000	25.950.900	1.313.556.000	1.905.720.000	5.377.878.000
73	Kota Sawahlunto	41.755.529.000	-	-	34.489.424.000	543.928.000	27.604.200	1.233.134.000	5.396.848.000	41.755.529.000
74	Kota Solok	10.748.890.000	-	-	1.800.360.000	318.667.000	26.222.400	1.233.134.000	7.309.141.000	10.748.890.000
75	Kota Pariaman	7.949.138.000	-	-	1.672.952.000	307.798.000	24.207.600	1.407.336.000	4.480.180.000	7.949.138.000
76	Kab. Pasaman Barat	24.257.918.000	-	-	1.678.283.000	1.220.551.000	46.126.200	1.892.609.000	19.266.609.000	24.257.918.000
77	Kab. Dharmasraya	24.009.840.000	54.924.000	-	9.540.547.000	1.639.649.000	-	1.259.941.000	10.982.777.000	23.557.940.900
78	Kab. Solok Selatan	33.142.255.000	-	-	1.804.522.000	19.191.142.000	-	1.313.556.000	10.607.491.000	32.950.700.700
79	Provinsi Riau	840.606.981.000	631.947.152.000	29.529.345.000	58.179.899.000	-	12.517.056.900	-	83.132.939.000	840.606.981.000
80	Kab. Bengkalis	933.913.425.000	876.667.833.000	4.652.670.000	7.853.513.000	-	9.272.246.100	3.240.072.000	22.160.404.000	933.913.425.000
81	Kab. Indragiri Hilir	276.706.064.000	98.367.590.000	18.198.534.000	93.379.023.000	-	4.124.624.400	2.748.331.000	43.397.030.000	276.706.064.000
82	Kab. Indragiri Hulu	172.134.348.000	92.693.001.000	8.149.950.000	35.846.327.000	-	2.060.550.600	1.259.941.000	27.305.271.000	172.134.348.000
83	Kab. Kampar	517.137.391.000	426.085.368.000	31.867.449.000	9.335.247.000	-	3.029.426.100	1.313.556.000	34.756.301.000	517.137.391.000
84	Kab. Kuantan Singingi	160.576.105.000	102.261.697.000	9.128.654.000	18.647.173.000	-	2.442.593.100	1.259.941.000	16.998.738.000	160.576.105.000
85	Kab. Pelalawan	292.785.412.000	134.465.650.000	73.977.930.000	15.586.940.000	-	7.891.607.100	1.882.186.000	33.873.165.000	292.785.412.000
86	Kab. Rokan Hilir	622.858.180.000	554.317.193.000	9.669.026.000	8.542.999.000	-	3.454.534.850	2.390.905.000	39.293.736.000	622.858.180.000
87	Kab. Rokan Hulu	289.659.843.000	232.271.001.000	5.512.888.000	8.130.901.000	-	1.973.711.400	1.259.941.000	33.687.684.000	289.659.843.000
88	Kab. Siak	538.522.540.000	465.683.808.000	11.787.013.000	8.543.947.000	-	5.138.448.900	1.468.647.000	27.419.188.000	538.522.540.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi							
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)=(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)
89	Kota Dumai	455.717.567.000	417.312.601.000	4.593.427.000	7.300.546.000	-	3.807.089.650	1.707.659.000	16.782.649.000	455.717.567.000
90	Kota Pekanbaru	163.464.079.000	124.417.252.000	7.987.530.000	8.542.935.000	-	1.724.175.300	1.259.941.000	13.227.487.000	159.441.003.300
91	Kab. Kepulauan Meranti	172.406.752.000	149.251.071.000	5.121.087.000	3.878.139.000	-	1.135.917.600	2.674.361.000	-	172.406.752.000
92	Provinsi Jambi	355.576.336.000	68.416.312.000	133.363.202.000	100.212.806.000	-	9.896.283.800	-	38.330.999.000	355.576.336.000
93	Kab. Batanghari	213.116.645.000	44.142.778.000	58.306.661.000	84.913.178.000	-	-	1.286.749.000	15.962.275.000	213.116.645.000
94	Kab. Bungo	105.218.877.000	12.766.340.000	25.035.643.000	50.051.424.000	-	325.491.600	1.313.556.000	14.915.821.000	105.218.877.000
95	Kab. Kerinci	64.198.388.000	12.907.891.000	25.165.563.000	15.216.450.000	1.398.663.000	289.219.800	1.340.364.000	7.202.454.000	64.198.388.000
96	Kab. Merangin	89.194.014.000	15.878.874.000	24.646.546.000	32.559.553.000	-	457.928.700	1.233.134.000	13.345.576.000	89.194.014.000
97	Kab. Muaro Jambi	174.967.613.000	51.904.067.000	73.813.066.000	26.833.358.000	-	1.383.211.500	1.286.749.000	16.212.965.000	171.740.119.500
98	Kab. Sarolangun	225.683.827.000	39.945.358.000	62.445.700.000	105.841.913.000	-	-	1.340.364.000	12.180.899.000	222.875.539.200
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	565.465.779.000	160.276.357.000	338.918.409.000	30.513.145.000	-	-	1.516.012.000	21.447.388.000	564.000.758.700
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	152.823.662.000	45.954.436.000	65.798.841.000	12.001.951.000	-	2.788.326.450	2.239.390.000	22.533.323.000	152.823.662.000
101	Kab. Tebo	168.189.009.000	28.419.515.000	36.053.122.000	82.406.961.000	-	3.075.612.800	1.313.556.000	14.149.473.000	168.189.009.000
102	Kota Jambi	57.771.296.000	14.979.402.000	24.645.882.000	10.889.430.000	-	289.293.900	1.233.134.000	5.056.196.000	57.771.296.000
103	Kota Sungai Penuh	55.118.322.000	12.709.078.000	25.035.643.000	11.373.748.000	-	262.833.000	1.313.556.000	3.807.250.000	55.118.322.000
104	Provinsi Sumatera Selatan	1.760.073.093.000	161.281.710.000	186.895.611.000	1.337.706.053.000	6.046.228.000	4.911.279.800	-	51.217.391.000	1.760.073.093.000
105	Kab. Lahat	1.644.140.654.000	19.024.064.000	19.610.992.000	1.587.273.571.000	3.016.284.000	557.271.000	1.313.556.000	11.547.895.000	1.644.140.654.000
106	Kab. Musi Banyuasin	1.308.026.469.000	344.080.654.000	585.838.138.000	337.122.699.000	312.014.000	4.760.223.000	1.313.556.000	26.702.357.000	1.308.026.469.000
107	Kab. Musi Rawas	393.210.164.000	53.729.222.000	99.786.836.000	217.512.906.000	697.159.000	954.381.300	1.313.556.000	14.817.085.000	393.210.164.000
108	Kab. Muara Enim	1.123.641.374.000	36.292.422.000	39.306.318.000	1.017.426.464.000	11.560.707.000	1.437.423.900	1.259.941.000	12.998.754.000	1.120.287.384.900
109	Kab. Ogan Komering Ilir	190.258.910.000	16.802.071.000	16.154.243.000	117.882.084.000	307.075.000	3.892.291.200	3.119.913.000	22.994.335.000	190.258.910.000
110	Kab. Ogan Komering Ulu	210.811.706.000	33.941.263.000	22.664.605.000	140.662.793.000	573.961.000	160.196.250	1.313.556.000	10.584.558.000	210.811.706.000
111	Kota Palembang	211.267.831.000	40.049.037.000	16.635.005.000	144.509.946.000	552.136.000	297.221.100	1.259.941.000	6.645.286.000	211.267.831.000
112	Kota Prabumulih	241.423.411.000	29.306.696.000	54.631.057.000	145.498.116.000	552.136.000	269.727.300	1.259.941.000	8.652.644.000	241.423.411.000
113	Kota Pagar Alam	249.792.548.000	17.164.039.000	17.342.877.000	205.526.942.000	2.090.195.000	302.841.900	1.313.556.000	4.717.056.000	249.792.548.000
114	Kota Lubuk Linggau	159.333.787.000	16.855.182.000	17.993.233.000	115.361.348.000	310.042.000	246.504.300	1.259.941.000	6.729.745.000	159.333.787.000
115	Kab. Banyuasin	287.952.357.000	39.543.916.000	53.178.688.000	167.491.957.000	562.396.000	1.259.007.600	2.598.530.000	18.954.567.000	287.952.357.000
116	Kab. Ogan Ilir	200.054.008.000	22.569.614.000	27.366.307.000	139.116.627.000	552.136.000	558.117.600	1.259.941.000	7.326.376.000	200.054.008.000
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timu	165.351.499.000	18.151.667.000	16.733.478.000	116.802.219.000	308.355.000	1.309.192.300	1.286.749.000	10.052.086.000	165.351.499.000
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selat	185.227.222.000	18.486.186.000	17.568.177.000	140.644.720.000	592.686.000	349.397.700	1.286.749.000	5.481.369.000	185.227.222.000
119	Kab. Empat Lawang	233.980.103.000	17.281.707.000	18.758.903.000	185.388.056.000	463.892.000	278.416.800	1.313.556.000	9.222.203.000	233.980.103.000
120	Kab. Penukal Abab Lematang	295.196.667.000	46.333.846.000	61.060.464.000	173.907.587.000	562.396.000	957.254.350	1.286.749.000	10.497.658.000	295.196.667.000
121	Kab. Musi Rawas Utara	457.613.207.000	86.895.092.000	51.752.721.000	303.582.779.000	302.134.000	929.745.700	1.259.941.000	11.494.473.000	457.613.207.000
122	Provinsi Bengkulu	106.690.663.000	-	-	83.759.727.000	186.441.000	35.088.300	-	21.732.563.000	106.098.519.850
123	Kab. Bengkulu Selatan	77.466.146.000	56.324.000	-	68.721.241.000	269.241.000	26.765.700	1.545.863.000	6.778.689.000	77.466.146.000
124	Kab. Bengkulu Utara	168.572.010.000	-	-	152.818.569.000	30.906.000	45.622.200	2.851.836.000	12.718.454.000	168.572.010.000
125	Kab. Rejang Lebong	31.987.019.000	586.699.000	2.268.114.000	21.695.104.000	204.568.000	37.647.900	1.313.556.000	5.788.850.000	31.987.019.000
126	Kota Bengkulu	21.006.492.000	-	-	13.314.646.000	21.879.000	4.475.100	1.527.268.000	6.127.688.000	21.006.492.000
127	Kab. Kaur	46.583.653.000	459.459.000	834.699.000	34.986.114.000	415.363.000	74.175.000	1.796.417.000	7.839.801.000	46.583.653.000
128	Kab. Seluma	82.771.772.000	53.978.000	-	71.171.700.000	131.022.000	30.117.000	1.642.353.000	9.668.511.000	82.771.772.000
129	Kab. Mukomuko	36.649.093.000	-	-	17.861.710.000	21.879.000	23.004.300	1.807.179.000	16.881.376.000	36.595.416.300
130	Kab. Lebong	38.361.082.000	4.144.826.000	2.268.114.000	26.159.976.000	31.549.000	-	1.313.556.000	4.267.522.000	38.216.941.550
131	Kab. Kepahiang	20.915.012.000	-	-	13.567.719.000	245.430.000	11.192.350	1.286.749.000	5.797.798.000	20.915.012.000
132	Kab. Bengkulu Tengah	58.007.784.000	-	-	47.589.645.000	55.315.000	11.878.500	1.307.268.000	9.015.867.000	58.007.784.000
133	Provinsi Lampung	105.113.363.000	57.326.082.000	-	422.702.000	26.397.205.000	334.568.100	-	19.666.494.000	105.112.035.300

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi							
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)=(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)
134	Kab. Lampung Barat	18.781.623.000	7.811.621.000	-	303.187.000	4.902.728.000	73.957.500	1.286.749.000	4.165.272.000	18.781.623.000
135	Kab. Lampung Selatan	20.737.746.000	11.280.307.000	-	10.584.000	1.836.938.000	21.072.000	2.778.391.000	4.742.934.000	20.737.746.000
136	Kab. Lampung Tengah	24.085.060.000	11.280.307.000	-	8.269.000	4.676.535.000	20.988.300	1.233.134.000	6.798.151.000	24.085.060.000
137	Kab. Lampung Utara	15.201.339.000	7.661.362.000	-	13.787.000	1.860.883.000	69.895.200	1.259.941.000	4.006.445.000	15.201.339.000
138	Kab. Lampung Timur	63.271.851.000	51.783.187.000	-	87.893.000	3.446.221.000	21.867.900	2.255.892.000	5.585.116.000	63.271.851.000
139	Kab. Tanggamus	76.083.077.000	7.661.362.000	-	30.935.000	61.717.087.000	21.395.700	2.448.574.000	4.121.493.000	76.083.077.000
140	Kab. Tulang Bawang	22.859.815.000	11.512.505.000	-	13.613.000	1.857.545.000	281.345.100	1.668.044.000	6.852.519.000	22.859.815.000
141	Kab. Way Kanan	21.166.373.000	7.811.621.000	-	106.784.000	1.882.842.000	879.682.800	1.286.749.000	7.144.467.000	21.166.373.000
142	Kota Bandar Lampung	15.866.961.000	7.511.103.000	-	916.000	1.836.938.000	20.955.300	1.271.803.000	5.158.578.000	15.866.961.000
143	Kota Metro	16.276.437.000	11.280.307.000	-	-	1.836.938.000	20.940.300	1.233.134.000	1.838.485.000	16.276.437.000
144	Kab. Pesawaran	18.657.114.000	7.661.362.000	-	111.289.000	4.755.534.000	21.412.500	1.866.319.000	4.171.404.000	18.657.114.000
145	Kab. Pringsewu	18.225.760.000	7.811.621.000	-	4.151.000	4.837.803.000	21.850.800	1.286.749.000	4.193.936.000	18.225.760.000
146	Kab. Mesuji	21.400.502.000	7.811.621.000	-	503.555.000	1.878.153.000	338.106.300	1.286.749.000	8.699.570.000	21.400.502.000
147	Kab. Tulang Bawang Barat	16.383.429.000	7.661.362.000	-	-	1.857.545.000	329.844.300	1.259.941.000	4.487.328.000	16.383.429.000
148	Kab. Pesisir Barat	21.440.499.000	7.961.880.000	-	5.611.000	4.924.856.000	23.196.600	2.708.303.000	5.744.755.000	21.440.499.000
149	Provinsi DKI Jakarta	105.830.014.000	99.913.505.000	-	-	-	-	5.916.509.000	-	105.830.014.000
150	Provinsi Jawa Barat	502.979.642.000	111.052.295.000	16.603.761.000	7.756.087.000	357.567.322.000	401.191.200	-	8.311.301.000	502.979.642.000
151	Kab. Bandung	411.510.858.000	8.146.421.000	2.118.037.000	359.571.000	398.321.313.000	40.439.700	1.259.941.000	1.170.576.000	411.510.858.000
152	Kab. Bekasi	43.349.838.000	10.414.494.000	9.850.637.000	994.396.000	19.529.388.000	33.271.550	1.482.693.000	1.000.000.000	43.349.838.000
153	Kab. Bogor	163.053.473.000	8.868.052.000	2.903.843.000	13.564.712.000	132.837.369.000	53.326.500	1.233.134.000	3.468.393.000	163.053.473.000
154	Kab. Ciamis	25.020.754.000	7.830.528.000	1.060.859.000	337.149.000	12.791.399.000	481.178.100	1.259.941.000	1.000.000.000	25.020.754.000
155	Kab. Cianjur	57.998.950.000	7.940.918.000	1.051.434.000	1.021.603.000	42.358.583.000	435.045.650	1.715.206.000	3.241.051.000	57.998.950.000
156	Kab. Cirebon	25.531.741.000	9.338.200.000	1.455.067.000	349.563.000	12.653.618.000	37.519.800	1.610.080.000	-	25.531.741.000
157	Kab. Garut	177.007.050.000	7.705.362.000	1.007.625.000	458.456.000	162.602.315.000	41.563.800	1.649.671.000	3.444.897.000	177.007.050.000
158	Kab. Indramayu	73.344.309.000	50.366.333.000	6.616.458.000	331.916.000	12.667.926.000	43.744.500	2.215.583.000	1.000.000.000	73.344.309.000
159	Kab. Karawang	49.504.220.000	18.802.971.000	12.546.796.000	768.493.000	14.551.320.000	19.427.100	1.683.479.000	1.000.000.000	49.504.220.000
160	Kab. Kuningan	23.565.671.000	7.830.528.000	1.060.859.000	348.081.000	12.791.399.000	82.359.300	1.259.941.000	-	23.565.671.000
161	Kab. Majalengka	26.667.931.000	9.456.522.000	1.838.357.000	330.948.000	12.653.618.000	46.551.600	1.233.134.000	1.000.000.000	26.667.931.000
162	Kab. Purwakarta	29.852.607.000	8.943.037.000	3.083.114.000	800.799.000	14.642.756.000	44.856.600	1.233.134.000	1.000.000.000	29.852.607.000
163	Kab. Subang	77.361.102.000	17.294.541.000	20.809.361.000	556.022.000	32.891.323.000	30.702.300	1.479.408.000	4.184.872.000	77.361.102.000
164	Kab. Sukabumi	153.048.740.000	7.705.362.000	1.007.625.000	5.564.236.000	132.855.520.000	93.539.700	1.940.732.000	3.626.804.000	153.048.740.000
165	Kab. Sumedang	48.509.231.000	9.654.603.000	2.520.414.000	348.268.000	33.630.499.000	36.472.500	1.233.134.000	1.000.414.000	48.509.231.000
166	Kab. Tasikmalaya	35.604.294.000	7.712.594.000	1.038.288.000	377.210.000	21.478.096.000	185.835.650	1.505.608.000	3.206.330.000	35.604.294.000
167	Kota Bandung	48.340.024.000	8.279.466.000	4.556.925.000	540.301.000	32.645.735.000	17.226.000	1.233.134.000	1.000.000.000	48.340.024.000
168	Kota Bekasi	28.719.688.000	8.442.269.000	2.698.819.000	764.967.000	14.530.200.000	15.048.300	1.233.134.000	1.000.000.000	28.719.688.000
169	Kota Bogor	26.654.508.000	7.823.140.000	1.029.529.000	781.732.000	14.708.776.000	15.375.600	1.259.941.000	1.000.000.000	26.654.508.000
170	Kota Cirebon	23.016.978.000	7.705.362.000	1.007.625.000	329.976.000	12.653.618.000	15.098.700	1.269.930.000	-	23.016.978.000
171	Kota Depok	26.473.714.000	7.747.469.000	1.147.645.000	764.967.000	14.530.200.000	15.048.300	1.233.134.000	1.000.000.000	26.473.714.000
172	Kota Sukabumi	29.509.727.000	7.705.362.000	1.007.625.000	470.154.000	18.003.405.000	58.438.900	1.233.134.000	1.000.000.000	29.509.727.000
173	Kota Tasikmalaya	24.059.601.000	7.705.362.000	1.007.625.000	333.186.000	12.653.618.000	82.209.400	1.233.134.000	1.000.000.000	24.059.601.000
174	Kota Cimahi	38.980.202.000	7.705.362.000	1.007.625.000	329.976.000	27.646.547.000	17.226.000	1.233.134.000	1.000.000.000	38.980.202.000
175	Kota Banjar	23.674.211.000	7.823.140.000	1.029.529.000	337.149.000	12.791.399.000	129.716.100	1.259.941.000	-	23.674.211.000
176	Kab. Bandung Barat	43.728.560.000	8.146.421.000	2.118.037.000	365.371.000	28.245.640.000	127.231.650	1.259.941.000	3.294.893.000	43.728.560.000
177	Kab. Pangandaran	27.279.176.000	7.823.140.000	1.029.529.000	338.428.000	12.791.399.000	132.312.300	1.649.589.000	3.205.560.000	27.279.176.000
178	Provinsi Jawa Tengah	10.181.495.000	1.100.191.000	2.730.093.000	81.778.000	330.761.000	1.779.099.600	-	-	10.181.495.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi							
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)=(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)
179	Kab. Banjarnegara	1.782.721.000	55.978.000	136.505.000	3.652.000	11.813.000	94.280.400	1.259.941.000	-	1.782.721.000
180	Kab. Banyumas	2.071.205.000	55.978.000	136.505.000	55.745.000	11.813.000	165.168.600	1.259.941.000	-	2.071.205.000
181	Kab. Batang	2.564.344.000	55.978.000	136.505.000	181.000	14.117.000	268.561.800	1.460.882.000	-	2.564.344.000
182	Kab. Blora	178.304.216.000	160.912.297.000	10.300.239.000	-	154.686.000	1.485.239.400	1.286.749.000	-	178.304.216.000
183	Kab. Boyolali	1.904.000.000	55.978.000	136.505.000	2.683.000	47.684.000	120.143.100	1.259.941.000	-	1.904.000.000
184	Kab. Brebes	2.378.037.000	55.978.000	136.505.000	906.000	11.813.000	198.042.300	1.511.438.000	-	2.378.037.000
185	Kab. Cilacap	3.927.017.000	329.712.000	136.505.000	23.769.000	11.813.000	193.383.900	1.779.723.000	1.000.000.000	3.927.017.000
186	Kab. Demak	2.002.400.000	55.479.000	133.601.000	-	31.602.000	100.454.400	1.446.354.000	-	2.002.400.000
187	Kab. Grobogan	4.480.289.000	196.256.000	827.849.000	17.309.000	33.369.000	634.837.500	1.286.749.000	-	4.480.289.000
188	Kab. Jepara	3.807.428.000	55.978.000	136.505.000	34.320.000	11.813.000	138.042.000	2.981.946.000	-	3.807.428.000
189	Kab. Karanganyar	1.709.643.000	55.978.000	136.505.000	513.000	12.199.000	73.204.800	1.259.941.000	-	1.709.643.000
190	Kab. Kebumen	2.125.033.000	56.478.000	139.409.000	4.068.000	12.064.000	81.800.400	1.639.762.000	-	2.125.033.000
191	Kab. Kendal	2.615.671.000	55.479.000	133.601.000	1.226.000	66.095.000	255.162.600	1.507.221.000	-	2.615.671.000
192	Kab. Klaten	1.647.942.000	55.479.000	133.601.000	1.284.000	11.940.000	63.602.400	1.233.134.000	-	1.647.942.000
193	Kab. Kudus	1.783.041.000	55.479.000	133.601.000	-	11.562.000	104.631.900	1.233.134.000	-	1.783.041.000
194	Kab. Magelang	1.834.416.000	55.978.000	136.505.000	974.000	168.096.000	63.722.100	1.259.941.000	-	1.834.416.000
195	Kab. Pati	3.983.057.000	189.434.000	809.848.000	2.372.000	11.562.000	379.097.700	1.511.864.000	-	3.983.057.000
196	Kab. Pekalongan	1.994.081.000	55.978.000	136.505.000	626.000	11.813.000	140.950.200	1.318.714.000	-	1.994.081.000
197	Kab. Pemalang	3.133.796.000	56.478.000	139.409.000	1.707.000	12.064.000	427.078.800	1.498.616.000	-	3.133.796.000
198	Kab. Purbalingga	1.778.898.000	55.479.000	133.601.000	790.000	11.562.000	103.147.500	1.233.134.000	-	1.778.898.000
199	Kab. Purworejo	1.790.295.000	55.479.000	133.601.000	6.286.000	17.567.000	67.063.200	1.353.246.000	-	1.790.295.000
200	Kab. Rembang	5.861.691.000	1.315.951.000	989.875.000	13.486.000	12.064.000	542.096.400	1.721.521.000	-	5.861.691.000
201	Kab. Semarang	2.274.182.000	55.479.000	133.601.000	1.410.000	454.215.000	118.734.900	1.233.134.000	-	2.274.182.000
202	Kab. Sragen	1.878.382.000	55.479.000	133.601.000	625.000	11.940.000	132.885.000	1.233.134.000	-	1.878.382.000
203	Kab. Sukoharjo	1.625.564.000	55.479.000	133.601.000	216.000	11.940.000	57.211.200	1.233.134.000	-	1.625.564.000
204	Kab. Tegal	2.473.742.000	55.978.000	136.505.000	644.000	11.813.000	264.526.200	1.385.935.000	-	2.473.742.000
205	Kab. Temanggung	1.908.720.000	56.478.000	139.409.000	-	90.735.000	100.418.400	1.286.749.000	-	1.908.720.000
206	Kab. Wonogiri	1.842.883.000	56.976.000	142.314.000	10.308.000	12.316.000	79.779.000	1.354.492.000	-	1.842.883.000
207	Kab. Wonosobo	1.897.059.000	56.478.000	139.409.000	240.000	25.292.000	116.490.900	1.286.749.000	-	1.897.059.000
208	Kota Magelang	1.606.836.000	55.479.000	133.601.000	-	17.567.000	49.969.500	1.233.134.000	-	1.606.836.000
209	Kota Pekalongan	1.707.380.000	55.479.000	133.601.000	-	11.562.000	71.331.300	1.268.477.000	-	1.707.380.000
210	Kota Salatiga	1.628.787.000	55.479.000	133.601.000	-	37.181.000	50.670.600	1.233.134.000	-	1.628.787.000
211	Kota Semarang	1.893.941.000	55.479.000	133.601.000	-	33.857.000	93.266.100	1.328.151.000	-	1.893.941.000
212	Kota Surakarta	1.606.857.000	55.479.000	133.601.000	-	11.940.000	51.663.900	1.233.134.000	-	1.606.857.000
213	Kota Tegal	1.731.665.000	55.479.000	133.601.000	-	11.562.000	78.591.900	1.268.560.000	-	1.731.665.000
214	Provinsi DI Yogyakarta	118.868.000	-	-	3.408.000	-	53.315.600	-	-	118.868.000
215	Kab. Bantul	1.354.676.000	-	-	130.000	-	11.140.500	1.317.384.000	-	1.354.676.000
216	Kab. Gunung Kidul	1.844.566.000	-	-	2.218.000	-	46.614.300	1.686.876.000	-	1.844.566.000
217	Kab. Kulon Progo	1.416.309.000	-	-	3.803.000	6.006.000	6.809.700	1.383.774.000	-	1.416.309.000
218	Kab. Sleman	1.312.042.000	-	-	8.224.000	6.384.000	30.928.300	1.233.134.000	-	1.312.042.000
219	Kota Yogyakarta	1.282.725.000	-	-	-	-	32.204.900	1.233.134.000	-	1.282.725.000
220	Provinsi Jawa Timur	1.178.315.111.000	1.020.009.714.000	119.088.166.000	30.805.738.000	739.780.000	3.818.023.950	-	-	1.178.315.111.000
221	Kab. Bangkalan	49.822.394.000	42.096.640.000	4.846.890.000	923.764.000	13.553.000	108.328.350	1.774.377.000	-	49.822.394.000
222	Kab. Banyuwangi	115.314.388.000	43.899.852.000	4.831.477.000	60.802.295.000	338.409.000	1.758.027.050	2.733.965.000	-	115.314.388.000
223	Kab. Blitar	51.958.589.000	43.899.852.000	4.831.477.000	1.008.114.000	15.489.000	406.699.150	1.576.701.000	-	51.958.589.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi							
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)=(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)
224	Kab. Bojonegoro	3.114.186.207.000	3.098.747.212.000	10.564.426.000	983.744.000	30.406.000	622.912.800	1.286.749.000	-	3.114.186.207.000
225	Kab. Bondowoso	58.901.354.000	43.258.508.000	4.786.185.000	8.268.242.000	454.731.000	253.856.400	1.286.749.000	-	58.901.354.000
226	Kab. Gresik	74.095.155.000	57.145.020.000	13.513.128.000	1.034.077.000	17.497.000	153.040.550	2.149.446.000	-	74.095.155.000
227	Kab. Jember	58.296.089.000	41.975.819.000	4.695.600.000	7.947.569.000	79.422.000	467.856.300	2.035.875.000	-	58.296.089.000
228	Kab. Jombang	207.184.813.000	197.729.346.000	6.519.074.000	996.566.000	34.770.000	149.415.600	1.259.941.000	-	207.184.813.000
229	Kab. Kediri	50.051.277.000	42.617.164.000	4.740.893.000	948.147.000	14.858.000	140.824.500	1.259.941.000	-	50.051.277.000
230	Kab. Lamongan	206.706.411.000	198.087.930.000	5.308.783.000	941.771.000	17.497.000	240.298.500	1.485.483.000	-	206.706.411.000
231	Kab. Lumajang	51.238.118.000	43.258.508.000	4.786.185.000	986.459.000	15.175.000	202.671.600	1.515.020.000	-	51.238.118.000
232	Kab. Madiun	214.973.399.000	203.995.187.000	6.341.035.000	989.317.000	130.600.000	1.077.775.400	1.313.556.000	-	214.973.399.000
233	Kab. Magetan	50.655.520.000	43.258.508.000	4.786.185.000	973.095.000	14.142.000	100.903.200	1.286.749.000	-	50.655.520.000
234	Kab. Malang	51.491.621.000	43.258.508.000	4.786.185.000	962.279.000	55.567.000	178.028.400	1.834.848.000	-	51.491.621.000
235	Kab. Mojokerto	53.212.981.000	45.383.575.000	5.027.790.000	1.077.615.000	118.987.000	189.080.450	1.313.556.000	-	53.212.981.000
236	Kab. Nganjuk	213.923.733.000	203.995.187.000	6.380.516.000	1.003.111.000	30.700.000	594.786.400	1.313.556.000	-	213.923.733.000
237	Kab. Ngawi	212.547.479.000	200.226.371.000	6.930.636.000	969.359.000	59.398.000	439.369.800	1.286.749.000	-	212.547.479.000
238	Kab. Pacitan	49.559.664.000	41.975.819.000	4.695.600.000	958.888.000	13.553.000	194.224.550	1.616.520.000	-	49.559.664.000
239	Kab. Pamekasan	49.975.826.000	41.975.819.000	5.367.871.000	921.342.000	13.553.000	48.339.300	1.535.626.000	-	49.975.826.000
240	Kab. Pasuruan	50.131.395.000	42.588.273.000	4.833.888.000	1.038.575.000	89.059.000	62.905.500	1.371.373.000	-	50.131.395.000
241	Kab. Ponorogo	51.832.353.000	43.899.852.000	4.831.477.000	983.428.000	111.602.000	207.372.300	1.313.556.000	-	51.832.353.000
242	Kab. Probolinggo	49.853.821.000	41.975.819.000	4.695.600.000	928.779.000	50.214.000	161.236.500	1.665.150.000	-	49.853.821.000
243	Kab. Sampang	50.405.793.000	42.626.357.000	4.786.212.000	941.762.000	13.847.000	104.268.450	1.876.728.000	-	50.405.793.000
244	Kab. Sidoarjo	52.119.326.000	46.232.587.000	3.374.027.000	921.342.000	20.640.000	46.195.200	1.416.272.000	-	52.119.326.000
245	Kab. Situbondo	57.322.625.000	41.975.819.000	4.695.600.000	7.946.513.000	81.696.000	372.736.000	2.049.036.000	-	57.322.625.000
246	Kab. Sumenep	50.457.412.000	32.908.905.000	8.081.956.000	961.400.000	14.142.000	109.187.000	8.322.552.000	-	50.457.412.000
247	Kab. Trenggalek	53.662.380.000	43.899.852.000	4.831.477.000	2.834.876.000	14.436.000	95.456.400	1.762.893.000	-	53.662.380.000
248	Kab. Tuban	589.522.879.000	575.990.108.000	8.184.612.000	1.056.409.000	30.111.000	590.497.800	1.633.641.000	-	589.522.879.000
249	Kab. Tulungagung	50.226.953.000	42.617.164.000	4.740.893.000	959.105.000	13.847.000	237.270.150	1.530.277.000	-	50.226.953.000
250	Kota Blitar	49.770.631.000	42.617.164.000	4.740.893.000	941.371.000	13.847.000	128.011.650	1.259.941.000	-	49.770.631.000
251	Kota Kediri	49.734.945.000	42.617.164.000	4.740.893.000	941.371.000	13.847.000	104.815.750	1.259.941.000	-	49.734.945.000
252	Kota Madiun	49.084.431.000	41.975.819.000	4.695.600.000	921.342.000	13.553.000	73.352.700	1.233.134.000	-	49.084.431.000
253	Kota Malang	48.997.561.000	41.975.819.000	4.695.600.000	921.342.000	14.541.000	46.995.300	1.233.134.000	-	48.997.561.000
254	Kota Mojokerto	48.988.706.000	41.975.819.000	4.695.600.000	921.342.000	17.124.000	43.563.900	1.233.134.000	-	48.988.706.000
255	Kota Pasuruan	49.021.872.000	41.975.819.000	4.695.600.000	921.342.000	17.071.000	43.446.000	1.266.746.000	-	49.021.872.000
256	Kota Probolinggo	49.016.372.000	41.975.819.000	4.695.600.000	921.342.000	13.553.000	46.288.800	1.255.288.000	-	49.016.372.000
257	Kota Surabaya	70.111.232.000	61.368.995.000	6.182.102.000	921.342.000	29.817.000	44.245.800	1.358.729.000	-	70.111.232.000
258	Kota Batu	49.074.734.000	41.975.819.000	4.695.600.000	921.342.000	82.767.000	49.677.600	1.233.134.000	-	49.074.734.000
259	Provinsi Kalimantan Barat	347.513.815.000	-	-	244.101.510.000	-	17.756.475.750	-	65.666.046.000	347.513.815.000
260	Kab. Bengkayang	60.022.214.000	-	-	37.591.709.000	-	692.883.900	2.066.206.000	17.955.377.000	60.022.214.000
261	Kab. Landak	53.208.664.000	-	-	34.816.100.000	-	235.121.700	1.286.749.000	15.796.470.000	52.660.046.700
262	Kab. Kapuas Hulu	95.186.870.000	-	-	73.511.072.000	-	1.604.391.750	1.313.556.000	15.223.400.000	95.186.870.000
263	Kab. Ketapang	309.754.519.000	-	-	246.379.621.000	-	5.731.076.650	4.191.464.000	48.309.790.000	309.754.519.000
264	Kab. Mempawah	32.668.802.000	-	-	20.923.240.000	-	171.820.800	2.212.192.000	8.862.529.000	32.668.802.000
265	Kab. Sambas	36.839.325.000	-	-	20.530.180.000	-	228.484.100	2.426.162.000	13.343.979.000	36.839.325.000
266	Kab. Sanggau	305.519.005.000	-	-	275.197.486.000	-	304.372.200	1.286.749.000	27.384.284.000	305.519.005.000
267	Kab. Sintang	127.827.370.000	-	-	97.397.849.000	-	1.675.555.200	1.313.556.000	20.492.470.000	127.827.370.000
268	Kota Pontianak	36.765.296.000	-	-	23.920.970.000	-	190.730.700	1.286.749.000	10.795.070.000	36.765.296.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi							
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)=(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)
269	Kota Singkawang	29.586.546.000	-	-	20.451.086.000	-	103.890.300	1.407.503.000	7.150.819.000	29.586.546.000
270	Kab. Sekadau	64.556.368.000	-	-	42.523.892.000	-	215.760.900	1.286.749.000	19.882.889.000	64.556.368.000
271	Kab. Melawi	50.781.681.000	-	-	30.706.480.000	-	1.297.023.300	1.313.556.000	13.538.174.000	50.781.681.000
272	Kab. Kayong Utara	45.006.850.000	-	-	27.657.853.000	-	251.841.300	5.794.825.000	10.615.339.000	45.006.850.000
273	Kab. Kubu Raya	64.359.993.000	-	-	42.975.527.000	-	827.146.800	2.656.182.000	15.969.479.000	64.359.993.000
274	Provinsi Kalimantan Tengah	2.665.896.636.000	-	226.606.000	2.332.009.570.000	-	158.695.985.500	-	60.021.925.000	2.665.896.636.000
275	Kab. Barito Selatan	707.244.524.000	301.532.000	75.347.000	694.514.738.000	-	1.302.333.600	1.313.556.000	6.112.814.000	704.205.745.600
276	Kab. Barito Utara	2.151.628.866.000	414.843.000	793.120.000	2.117.823.220.000	-	4.879.030.800	1.340.364.000	10.352.389.000	2.140.244.460.800
277	Kab. Kapuas	1.518.751.240.000	-	75.347.000	1.486.720.522.000	-	3.733.797.300	1.474.207.000	17.774.473.000	1.518.751.240.000
278	Kab. Kotawaringin Barat	314.257.850.000	-	28.326.000	270.477.575.000	-	6.796.268.700	2.202.975.000	28.254.904.000	314.257.850.000
279	Kab. Kotawaringin Timur	474.449.558.000	-	27.759.000	410.271.915.000	-	3.833.448.300	1.827.265.000	46.485.301.000	474.449.558.000
280	Kota Palangkaraya	286.940.208.000	-	28.326.000	271.325.437.000	-	-	1.340.364.000	8.250.851.000	281.908.736.700
281	Kab. Katingan	309.578.580.000	-	27.759.000	266.986.271.000	-	6.419.650.500	1.673.051.000	14.701.342.000	309.578.580.000
282	Kab. Seruyan	335.385.279.000	-	27.193.000	287.432.003.000	-	6.147.390.000	2.126.839.000	25.064.163.000	335.385.279.000
283	Kab. Sukamara	292.431.422.000	-	27.759.000	272.726.497.000	-	2.721.762.550	1.780.748.000	13.633.160.000	292.431.422.000
284	Kab. Lamandau	306.970.128.000	-	28.326.000	276.488.774.000	-	6.901.661.000	1.340.364.000	18.352.928.000	306.970.128.000
285	Kab. Gunung Mas	464.899.487.000	-	27.193.000	438.329.118.000	-	4.301.585.700	1.286.749.000	9.915.360.000	464.899.487.000
286	Kab. Pulang Pisau	342.333.117.000	-	27.759.000	320.861.634.000	-	1.525.547.700	1.971.283.000	14.255.842.000	342.333.117.000
287	Kab. Murung Raya	1.732.067.459.000	-	76.884.000	1.697.169.805.000	-	4.984.979.400	1.340.364.000	7.466.940.000	1.720.435.840.400
288	Kab. Barito Timur	333.680.223.000	295.379.000	27.193.000	320.356.792.000	-	832.961.400	1.286.749.000	8.822.531.000	333.680.223.000
289	Provinsi Kalimantan Selatan	3.495.415.623.000	2.461.707.000	-	3.450.459.752.000	-	6.779.979.050	-	24.955.924.000	3.495.415.623.000
290	Kab. Banjar	863.810.079.000	391.037.000	-	854.536.743.000	-	295.449.700	1.297.839.000	7.022.490.000	863.810.079.000
291	Kab. Barito Kuala	506.161.243.000	387.250.000	-	494.987.198.000	-	227.331.000	1.362.683.000	8.589.332.000	506.161.243.000
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	462.474.942.000	394.823.000	-	454.891.374.000	-	74.065.800	1.313.556.000	5.578.625.000	462.474.942.000
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	534.723.790.000	391.037.000	-	529.417.760.000	-	72.678.600	1.286.749.000	3.277.190.000	534.723.790.000
294	Kab. Hulu Sungai Utara	571.401.589.000	666.534.000	-	564.240.768.000	-	-	1.233.134.000	4.965.793.000	571.232.259.650
295	Kab. Kotabaru	1.776.568.660.000	499.837.000	-	1.747.739.958.000	-	575.657.100	5.638.599.000	16.599.816.000	1.776.568.660.000
296	Kab. Tabalong	1.243.742.405.000	6.721.653.000	47.587.000	1.227.007.884.000	-	486.102.000	1.313.556.000	6.970.532.000	1.242.608.167.000
297	Kab. Tanah Laut	816.425.371.000	391.037.000	-	805.414.966.000	-	403.780.650	2.373.115.000	7.279.415.000	816.425.371.000
298	Kab. Tapin	1.000.072.494.000	391.037.000	-	989.459.309.000	-	43.057.500	1.286.749.000	8.677.200.000	1.000.072.494.000
299	Kota Banjarbaru	435.099.526.000	391.037.000	-	428.499.989.000	-	56.939.100	1.286.749.000	4.702.857.000	435.099.526.000
300	Kota Banjarmasin	383.043.855.000	383.462.000	-	375.673.793.000	-	37.326.900	1.233.134.000	5.615.096.000	383.043.855.000
301	Kab. Balangan	2.449.767.855.000	777.202.000	-	2.441.392.898.000	-	357.370.650	1.259.941.000	5.678.956.000	2.449.767.855.000
302	Kab. Tanah Bumbu	2.969.743.294.000	394.823.000	-	2.950.621.396.000	-	372.404.700	2.011.052.000	14.968.120.000	2.969.743.294.000
303	Provinsi Kalimantan Timur	8.188.057.051.000	171.947.900.000	324.678.189.000	7.452.565.271.000	-	120.885.412.050	-	43.400.672.000	8.188.057.051.000
304	Kab. Berau	3.373.405.286.000	30.850.653.000	64.169.251.000	3.213.453.604.000	-	8.362.750.500	5.206.099.000	20.547.999.000	3.373.405.286.000
305	Kab. Kutai Kartanegara	7.710.058.895.000	257.232.156.000	356.615.524.000	7.050.931.555.000	-	10.724.933.700	2.910.471.000	19.731.608.000	7.710.058.895.000
306	Kab. Kutai Barat	3.114.883.768.000	44.513.492.000	77.686.496.000	2.954.806.647.000	-	5.396.725.500	1.340.364.000	17.817.877.000	3.114.883.768.000
307	Kab. Kutai Timur	6.036.358.767.000	43.407.856.000	76.231.578.000	5.855.087.133.000	-	13.296.679.500	3.321.961.000	37.453.049.000	6.036.358.767.000
308	Kab. Paser	2.411.608.498.000	33.146.703.000	65.421.775.000	2.281.909.022.000	-	2.558.822.700	2.267.605.000	20.333.984.000	2.411.608.498.000
309	Kota Balikpapan	1.466.910.821.000	93.988.846.000	75.364.838.000	1.284.738.191.000	-	1.261.930.500	1.546.031.000	6.951.956.000	1.466.910.821.000
310	Kota Bontang	1.692.449.530.000	43.449.574.000	63.911.155.000	1.571.231.131.000	-	1.546.131.900	1.518.532.000	7.070.837.000	1.692.449.530.000
311	Kota Samarinda	1.468.868.906.000	40.897.057.000	71.960.423.000	1.339.221.474.000	-	2.325.490.050	1.233.735.000	11.864.019.000	1.468.868.906.000
312	Kab. Penajam Paser Utara	1.540.022.212.000	52.425.509.000	67.416.254.000	1.397.978.415.000	-	2.631.508.200	1.627.530.000	11.687.418.000	1.533.882.026.200
313	Kab. Mahakam Ulu	1.832.220.050.000	42.583.193.000	76.280.247.000	1.687.762.138.000	-	7.550.550.800	1.340.364.000	8.734.895.000	1.832.220.050.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi							
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)=(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)
314	Provinsi Sulawesi Utara	68.789.423.000	-	-	43.604.046.000	24.639.916.000	152.415.400	-	-	68.789.423.000
315	Kab. Bolaang Mongondow	35.128.323.000	-	-	31.084.425.000	2.182.209.000	12.440.350	1.831.054.000	-	35.128.323.000
316	Kab. Minahasa	40.055.962.000	-	-	6.137.009.000	32.262.434.000	8.676.600	1.624.636.000	-	40.055.962.000
317	Kab. Sangihe	9.997.480.000	-	-	3.263.945.000	2.068.169.000	1.758.900	4.656.542.000	-	9.997.480.000
318	Kota Bitung	34.094.994.000	-	-	30.227.993.000	2.181.705.000	8.584.500	1.653.720.000	-	34.094.994.000
319	Kota Manado	11.066.125.000	-	-	5.948.490.000	3.552.759.000	8.594.100	1.533.268.000	-	11.066.125.000
320	Kab. Kepulauan Talaud	9.022.594.000	-	-	3.263.945.000	2.068.169.000	1.758.900	3.681.656.000	-	9.022.594.000
321	Kab. Minahasa Selatan	13.204.004.000	-	-	7.050.666.000	4.471.812.000	-	1.671.853.000	-	13.198.298.800
322	Kota Tomohon	33.214.930.000	-	-	3.264.032.000	28.708.909.000	1.768.200	1.233.134.000	-	33.214.930.000
323	Kab. Minahasa Utara	42.633.623.000	-	-	36.287.768.000	3.785.169.000	44.580.000	2.406.411.000	-	42.633.623.000
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulanc	8.044.511.000	-	-	3.263.945.000	2.068.169.000	1.758.900	2.703.573.000	-	8.044.511.000
325	Kota Kotamobagu	8.405.683.000	-	-	5.077.820.000	2.085.087.000	-	1.233.134.000	-	8.400.004.150
326	Kab. Bolaang Mongondow Uta	10.939.518.000	-	-	6.774.673.000	2.132.411.000	-	1.998.859.000	-	10.917.398.450
327	Kab. Minahasa Tenggara	8.274.263.000	-	-	3.482.391.000	3.254.797.000	3.852.550	1.528.187.000	-	8.274.263.000
328	Kab. Bolaang Mongondow Tin	10.321.963.000	-	-	6.456.313.000	2.198.246.000	-	1.654.605.000	-	10.321.963.000
329	Kab. Bolaang Mongondow Se	17.510.596.000	-	-	13.145.875.000	2.141.318.000	9.755.400	2.165.423.000	-	17.510.596.000
330	Provinsi Sulawesi Tengah	787.644.571.000	27.203.164.000	252.176.158.000	479.140.968.000	-	4.117.958.650	-	15.722.718.000	787.644.571.000
331	Kab. Banggai	989.024.381.000	75.951.306.000	615.516.750.000	282.326.679.000	-	83.156.700	5.713.972.000	9.207.972.000	989.024.381.000
332	Kab. Banggai Kepulauan	105.269.121.000	4.291.306.000	38.606.397.000	58.368.320.000	-	20.925.000	3.889.201.000	-	105.269.121.000
333	Kab. Buol	105.827.121.000	4.291.306.000	38.606.397.000	53.107.152.000	-	-	2.347.388.000	7.112.470.000	105.519.356.400
334	Kab. Tolitoli	104.790.352.000	4.291.306.000	38.606.397.000	52.996.795.000	-	94.091.400	3.185.079.000	5.378.195.000	104.790.352.000
335	Kab. Donggala	112.187.393.000	4.338.253.000	38.753.798.000	59.946.437.000	-	-	3.767.856.000	5.207.685.000	112.040.256.300
336	Kab. Morowali	849.895.002.000	4.338.253.000	38.753.798.000	791.107.716.000	-	-	4.994.784.000	8.936.166.000	849.171.628.200
337	Kab. Poso	126.167.035.000	4.338.253.000	38.753.798.000	75.868.622.000	-	64.179.000	1.765.073.000	5.227.093.000	126.167.035.000
338	Kota Palu	113.720.481.000	4.291.306.000	38.606.397.000	67.287.636.000	-	33.366.300	1.400.972.000	1.973.132.000	113.720.481.000
339	Kab. Parigi Moutong	109.843.214.000	4.291.306.000	38.606.397.000	58.234.114.000	-	114.596.100	4.103.474.000	4.225.732.000	109.843.214.000
340	Kab. Tojo Una Una	193.657.741.000	15.781.278.000	86.658.914.000	82.568.620.000	-	62.256.000	5.107.256.000	3.333.893.000	193.657.741.000
341	Kab. Sigi	103.973.368.000	4.338.253.000	38.753.798.000	54.253.167.000	-	35.972.100	1.340.364.000	5.167.668.000	103.973.368.000
342	Kab. Banggai Laut	108.149.222.000	4.291.306.000	38.606.397.000	58.766.860.000	-	20.925.000	6.370.762.000	-	108.149.222.000
343	Kab. Morowali Utara	412.476.119.000	15.379.492.000	85.553.411.000	300.146.478.000	-	151.212.300	2.257.396.000	8.519.492.000	412.476.119.000
344	Provinsi Sulawesi Selatan	131.581.308.000	33.000	3.041.974.000	88.395.998.000	-	583.417.800	-	9.225.347.000	130.471.332.000
345	Kab. Bantaeng	4.567.359.000	3.000	217.284.000	2.724.682.000	-	5.880.600	1.409.468.000	-	4.567.359.000
346	Kab. Barru	5.973.734.000	3.000	221.811.000	2.788.517.000	-	7.090.500	1.740.275.000	1.000.000.000	5.973.734.000
347	Kab. Bone	7.527.953.000	15.000	1.334.743.000	2.924.315.000	-	14.508.600	2.015.491.000	1.012.931.000	7.527.953.000
348	Kab. Bulukumba	5.110.280.000	3.000	217.284.000	2.729.382.000	-	4.253.100	1.963.157.000	-	5.110.280.000
349	Kab. Enrekang	7.027.690.000	3.000	221.811.000	2.776.645.000	-	5.868.000	1.313.556.000	2.503.058.000	7.027.690.000
350	Kab. Gowa	4.558.391.000	3.000	212.757.000	2.699.532.000	-	40.403.700	1.259.941.000	-	4.558.391.000
351	Kab. Jeneponto	4.768.983.000	3.000	212.757.000	2.672.076.000	-	5.469.000	1.665.946.000	-	4.768.983.000
352	Kab. Luwu	8.944.071.000	14.000	1.306.936.000	3.072.037.000	-	5.071.200	1.843.605.000	2.503.375.000	8.944.071.000
353	Kab. Luwu Utara	23.861.971.000	3.000	226.337.000	13.748.531.000	-	28.445.700	1.676.908.000	7.897.627.000	23.861.971.000
354	Kab. Maros	4.670.703.000	3.000	221.811.000	2.782.098.000	-	11.481.900	1.424.694.000	-	4.670.703.000
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	13.527.885.000	3.000	221.811.000	2.675.237.000	-	-	10.377.213.000	-	13.482.328.400
356	Kota Palopo	7.185.435.000	3.000	226.337.000	2.827.926.000	-	4.221.900	1.371.302.000	2.545.823.000	7.185.435.000
357	Kab. Luwu Timur	291.022.809.000	3.000	226.337.000	276.563.270.000	-	-	1.881.707.000	6.599.083.000	290.525.723.050
358	Kab. Pinrang	7.475.408.000	3.000	217.284.000	2.762.360.000	-	5.749.500	1.737.537.000	2.537.807.000	7.475.408.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi							
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)=(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)
359	Kab. Sinjai	4.930.829.000	3.000	221.811.000	2.771.853.000	-	7.967.400	1.711.092.000	-	4.930.829.000
360	Kab. Kepulauan Selayar	11.317.026.000	3.000	212.757.000	2.672.076.000	-	3.896.400	8.221.291.000	-	11.317.026.000
361	Kab. Sidenreng Rappang	8.078.962.000	15.000	1.334.743.000	2.725.891.000	-	-	1.286.749.000	2.505.626.000	8.058.941.100
362	Kab. Soppeng	9.010.887.000	15.000	1.334.743.000	2.724.373.000	-	7.143.300	1.286.749.000	3.443.341.000	9.010.887.000
363	Kab. Takalar	5.201.268.000	3.000	212.757.000	2.745.249.000	-	7.149.600	2.019.456.000	-	5.201.268.000
364	Kab. Tana Toraja	5.849.295.000	3.000	221.811.000	2.859.670.000	-	14.674.200	1.313.556.000	1.181.209.000	5.849.295.000
365	Kab. Wajo	17.411.471.000	105.000	10.060.370.000	2.673.686.000	-	5.011.200	1.792.193.000	2.670.714.000	17.411.471.000
366	Kota Parepare	5.368.610.000	3.000	212.757.000	2.672.076.000	-	4.140.600	1.270.001.000	1.000.000.000	5.368.610.000
367	Kota Makassar	7.206.556.000	100.000	212.757.000	4.764.397.000	-	16.653.900	2.005.211.000	-	7.206.556.000
368	Kab. Toraja Utara	6.102.467.000	3.000	217.284.000	2.748.903.000	-	10.424.400	1.286.749.000	1.612.884.000	6.102.467.000
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	991.368.225.000	-	-	968.372.716.000	-	3.204.422.000	-	10.476.445.000	991.368.225.000
370	Kab. Buton	65.724.163.000	-	-	62.390.762.000	-	22.557.000	2.196.127.000	1.004.795.000	65.724.163.000
371	Kab. Konawe	280.779.290.000	-	-	273.726.077.000	-	195.329.100	1.769.243.000	4.423.763.000	280.323.522.100
372	Kab. Kolaka	549.589.440.000	-	-	542.668.686.000	-	116.032.800	2.524.576.000	4.004.879.000	549.589.440.000
373	Kab. Muna	70.928.559.000	-	-	64.961.490.000	-	-	2.190.935.000	3.566.771.000	70.781.231.050
374	Kota Kendari	83.315.884.000	-	-	76.400.001.000	-	45.882.850	1.317.292.000	5.471.852.000	83.315.884.000
375	Kota Bau-bau	63.282.032.000	-	-	61.836.372.000	-	12.211.200	1.345.862.000	-	63.282.032.000
376	Kab. Konawe Selatan	313.765.640.000	-	-	308.059.218.000	-	32.436.000	2.402.845.000	3.121.365.000	313.765.640.000
377	Kab. Bombana	303.166.534.000	-	-	294.662.760.000	-	144.058.850	3.363.080.000	4.626.418.000	303.166.534.000
378	Kab. Wakatobi	65.966.000.000	-	-	61.744.324.000	-	11.574.000	4.124.238.000	-	65.966.000.000
379	Kab. Kolaka Utara	242.777.648.000	-	-	238.622.974.000	-	43.816.200	2.087.292.000	1.859.259.000	242.777.648.000
380	Kab. Konawe Utara	1.242.635.330.000	-	-	1.232.560.880.000	-	-	2.243.348.000	6.586.339.000	1.242.267.839.300
381	Kab. Buton Utara	66.476.101.000	-	-	62.866.282.000	-	-	2.472.469.000	1.004.795.000	66.368.837.800
382	Kab. Konawe Kepulauan	67.274.424.000	-	-	65.088.528.000	-	11.574.000	2.014.165.000	-	67.274.424.000
383	Kab. Kolaka Timur	127.780.503.000	-	-	122.346.715.000	-	-	1.286.749.000	3.675.820.000	127.547.443.200
384	Kab. Muna Barat	66.701.492.000	-	-	61.744.324.000	-	15.974.100	2.223.750.000	2.621.313.000	66.701.492.000
385	Kab. Buton Tengah	106.380.872.000	-	-	102.725.328.000	-	46.314.450	2.185.215.000	1.339.927.000	106.380.872.000
386	Kab. Buton Selatan	64.121.529.000	-	-	61.813.332.000	-	-	2.228.245.000	-	64.087.439.750
387	Provinsi Bali	62.000	-	-	-	-	18.600	-	-	62.000
388	Kab. Badung	1.692.811.000	-	-	-	-	2.100	1.692.804.000	-	1.692.811.000
389	Kab. Bangli	1.286.756.000	-	-	-	-	4.550	1.286.749.000	-	1.286.756.000
390	Kab. Buleleng	2.131.709.000	-	-	-	-	24.700	2.131.671.000	-	2.131.709.000
391	Kab. Gianyar	1.355.733.000	-	-	-	-	2.100	1.355.726.000	-	1.355.733.000
392	Kab. Jembrana	1.708.595.000	-	-	-	-	84.500	1.708.465.000	-	1.708.595.000
393	Kab. Karangasem	1.814.694.000	-	-	-	-	2.100	1.814.687.000	-	1.814.694.000
394	Kab. Klungkung	1.842.525.000	-	-	-	-	4.550	1.842.518.000	-	1.842.525.000
395	Kab. Tabanan	1.450.887.000	-	-	-	-	24.700	1.450.849.000	-	1.450.887.000
396	Kota Denpasar	1.342.767.000	-	-	-	-	2.100	1.342.760.000	-	1.342.767.000
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	387.498.095.000	-	-	383.118.858.000	-	843.775.800	-	-	387.498.095.000
398	Kab. Bima	61.101.645.000	-	-	56.597.346.000	-	-	4.362.845.000	-	60.986.641.700
399	Kab. Dompu	59.533.160.000	-	-	56.653.748.000	-	-	2.308.896.000	-	59.172.289.950
400	Kab. Lombok Barat	60.520.191.000	-	-	58.426.641.000	-	17.820.300	2.012.660.000	-	60.520.191.000
401	Kab. Lombok Tengah	57.456.750.000	-	-	55.840.119.000	-	-	1.548.995.000	-	57.406.759.800
402	Kab. Lombok Timur	57.745.816.000	-	-	55.489.250.000	-	16.835.400	2.163.901.000	-	57.745.816.000
403	Kab. Sumbawa	268.492.544.000	-	-	263.138.956.000	-	153.770.700	4.714.093.000	-	268.492.544.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi							
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)=(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)
404	Kota Mataram	56.478.888.000	-	-	55.150.190.000	-	13.364.700	1.273.945.000	-	56.478.888.000
405	Kota Bima	56.467.722.000	-	-	55.150.190.000	-	13.164.900	1.262.149.000	-	56.467.722.000
406	Kab. Sumbawa Barat	823.765.869.000	-	-	821.031.465.000	-	103.809.900	2.193.022.000	-	823.523.645.900
407	Kab. Lombok Utara	57.704.217.000	-	-	55.839.938.000	-	15.361.500	1.793.151.000	-	57.704.217.000
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.911.382.000	-	-	285.587.000	1.592.241.000	-	-	-	1.911.382.000
409	Kab. Alor	4.541.652.000	-	-	9.050.000	276.231.000	-	4.255.765.000	-	4.541.652.000
410	Kab. Belu	1.535.200.000	-	-	24.893.000	54.604.000	-	1.454.972.000	-	1.535.200.000
411	Kab. Ende	4.082.701.000	-	-	1.745.000	1.691.837.000	-	2.388.513.000	-	4.082.701.000
412	Kab. Flores Timur	3.339.184.000	-	-	1.734.000	189.220.000	-	3.147.624.000	-	3.339.184.000
413	Kab. Kupang	3.900.008.000	-	-	132.175.000	55.709.000	-	3.701.995.000	-	3.900.008.000
414	Kab. Lembata	3.418.817.000	-	-	1.703.000	481.952.000	-	2.934.556.000	-	3.418.817.000
415	Kab. Manggarai	3.663.309.000	-	-	58.694.000	1.794.601.000	-	1.809.408.000	-	3.663.309.000
416	Kab. Ngada	1.958.256.000	-	-	1.776.000	76.952.000	-	1.878.922.000	-	1.958.256.000
417	Kab. Sikka	3.617.910.000	-	-	1.670.000	359.291.000	-	3.256.343.000	-	3.617.910.000
418	Kab. Sumba Barat	1.650.192.000	-	-	1.670.000	52.396.000	-	1.595.520.000	-	1.650.192.000
419	Kab. Sumba Timur	3.704.100.000	-	-	1.670.000	52.396.000	-	3.649.428.000	-	3.704.100.000
420	Kab. Timor Tengah Selatan	1.927.563.000	-	-	9.637.000	54.604.000	-	1.862.716.000	-	1.927.563.000
421	Kab. Timor Tengah Utara	1.918.686.000	-	-	253.672.000	55.709.000	-	1.608.699.000	-	1.918.686.000
422	Kota Kupang	1.380.727.000	-	-	4.552.000	52.396.000	-	1.323.173.000	-	1.380.727.000
423	Kab. Rote Ndao	3.285.182.000	-	-	1.705.000	53.501.000	-	3.229.370.000	-	3.285.182.000
424	Kab. Manggarai Barat	4.406.916.000	-	-	3.317.000	260.891.000	-	4.139.344.000	-	4.406.916.000
425	Kab. Nagekeo	2.215.912.000	-	-	4.675.000	329.491.000	-	1.881.140.000	-	2.215.912.000
426	Kab. Sumba Barat Daya	1.916.738.000	-	-	1.670.000	52.396.000	-	1.862.066.000	-	1.916.738.000
427	Kab. Sumba Tengah	1.844.046.000	-	-	1.739.000	54.604.000	-	1.787.097.000	-	1.844.046.000
428	Kab. Manggarai Timur	2.114.520.000	-	-	26.670.000	254.008.000	-	1.833.236.000	-	2.114.520.000
429	Kab. Sabu Raijua	2.438.534.000	-	-	1.670.000	52.396.000	-	2.383.862.000	-	2.438.534.000
430	Kab. Malaka	1.648.711.000	-	-	23.629.000	52.396.000	-	1.572.080.000	-	1.648.711.000
431	Provinsi Maluku	46.526.162.000	6.156.205.000	-	4.304.711.000	-	20.320.543.300	-	1.547.258.000	46.526.162.000
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	11.461.956.000	1.119.310.000	-	837.469.000	-	-	7.924.984.000	-	10.121.324.950
433	Kab. Maluku Tengah	24.974.863.000	10.353.616.000	-	823.763.000	-	723.830.700	7.494.030.000	2.948.740.000	24.974.863.000
434	Kab. Maluku Tenggara	5.941.018.000	1.074.538.000	-	451.666.000	-	-	3.953.161.000	-	5.941.018.000
435	Kab. Buru	9.667.593.000	1.074.538.000	-	451.666.000	-	-	2.509.640.000	-	4.883.951.100
436	Kota Ambon	4.793.255.000	1.074.538.000	-	451.666.000	-	190.378.800	1.631.429.000	1.000.000.000	4.793.255.000
437	Kab. Seram Bagian Barat	8.224.163.000	1.119.310.000	-	549.046.000	-	222.678.000	4.812.476.000	1.000.000.000	8.224.163.000
438	Kab. Seram Bagian Timur	31.636.978.000	20.281.895.000	-	782.844.000	-	654.076.200	6.003.763.000	2.386.766.000	31.636.978.000
439	Kab. Kepulauan Aru	11.061.439.000	1.074.538.000	-	1.111.955.000	-	216.232.500	8.153.051.000	-	11.061.439.000
440	Kota Tual	5.492.301.000	1.074.538.000	-	451.666.000	-	138.188.100	3.504.444.000	-	5.492.301.000
441	Kab. Maluku Barat Daya	25.278.619.000	1.074.538.000	-	13.609.818.000	-	138.392.700	10.131.928.000	-	25.278.619.000
442	Kab. Buru Selatan	10.915.571.000	1.074.538.000	-	451.666.000	-	1.878.164.400	3.124.135.000	-	10.915.571.000
443	Provinsi Papua	253.604.475.000	-	-	210.417.816.000	-	8.277.945.400	-	2.677.705.000	253.604.475.000
444	Kab. Biak Numfor	43.433.444.000	-	-	37.884.561.000	-	130.930.500	4.742.480.000	-	43.433.444.000
445	Kab. Jayapura	49.542.251.000	-	-	37.884.561.000	-	2.227.308.850	1.948.761.000	6.158.404.000	49.542.251.000
446	Kab. Jayawijaya	40.037.345.000	-	-	37.884.561.000	-	132.627.900	1.340.364.000	-	40.037.345.000
447	Kab. Merauke	56.054.792.000	-	-	37.884.561.000	-	670.015.500	6.434.046.000	9.499.063.000	56.054.792.000
448	Kab. Mimika	1.822.331.525.000	-	-	1.796.701.197.000	-	-	3.557.002.000	3.893.245.000	1.818.908.110.050

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi							
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)=(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)
449	Kab. Nabire	52.506.979.000	-	-	38.454.883.000	-	-	4.866.515.000	2.960.004.000	47.219.524.250
450	Kab. Paniai	128.598.827.000	-	-	124.895.619.000	-	631.848.750	1.340.364.000	1.000.000.000	128.598.827.000
451	Kab. Puncak Jaya	40.032.188.000	-	-	37.884.561.000	-	131.149.500	1.340.364.000	-	40.032.188.000
452	Kab. Kepulauan Yapen	44.098.691.000	-	-	37.884.561.000	-	130.662.300	5.408.262.000	-	44.098.691.000
453	Kota Jayapura	42.414.330.000	-	-	37.884.561.000	-	293.179.800	1.697.322.000	1.410.973.000	42.414.330.000
454	Kab. Sarmi	61.540.562.000	-	-	38.126.475.000	-	-	3.631.499.000	1.000.000.000	50.058.490.850
455	Kab. Keerom	51.381.725.000	-	-	38.850.210.000	-	494.317.650	1.340.364.000	5.739.515.000	51.381.725.000
456	Kab. Yahukimo	41.582.919.000	-	-	37.884.561.000	-	250.190.400	1.340.364.000	1.154.257.000	41.582.919.000
457	Kab. Pegunungan Bintang	45.909.613.000	-	-	41.191.930.000	-	387.336.600	1.340.364.000	1.722.387.000	45.909.613.000
458	Kab. Tolikara	40.038.927.000	-	-	37.884.561.000	-	288.388.750	1.340.364.000	-	40.038.927.000
459	Kab. Boven Digoel	48.531.692.000	-	-	37.999.716.000	-	1.097.612.100	1.340.364.000	5.529.159.000	48.531.692.000
460	Kab. Mappi	43.829.381.000	-	-	37.884.561.000	-	853.024.900	2.085.839.000	2.332.337.000	43.829.381.000
461	Kab. Asmat	128.098.489.000	-	-	122.890.246.000	-	385.880.400	2.910.311.000	1.000.000.000	128.098.489.000
462	Kab. Waropen	42.484.956.000	-	-	37.884.561.000	-	-	2.401.470.000	1.000.000.000	41.800.618.450
463	Kab. Supiori	41.869.051.000	-	-	37.884.561.000	-	130.930.500	3.178.241.000	-	41.869.051.000
464	Kab. Mamberamo Raya	43.129.389.000	-	-	37.884.561.000	-	-	2.818.615.000	-	41.397.815.750
465	Kab. Mamberamo Tengah	41.742.444.000	-	-	37.884.561.000	-	627.514.200	1.340.364.000	-	41.742.444.000
466	Kab. Yalimo	41.116.334.000	-	-	37.884.561.000	-	156.324.600	1.340.364.000	1.000.000.000	41.116.334.000
467	Kab. Lanny Jaya	40.037.353.000	-	-	37.884.561.000	-	132.630.300	1.340.364.000	-	40.037.353.000
468	Kab. Nduga	129.229.127.000	-	-	125.855.496.000	-	192.749.400	1.340.364.000	1.000.000.000	129.229.127.000
469	Kab. Dogiyai	128.448.044.000	-	-	123.906.841.000	-	543.026.100	1.340.364.000	1.000.000.000	128.448.044.000
470	Kab. Puncak	127.809.005.000	-	-	124.470.761.000	-	394.633.850	1.340.364.000	1.000.000.000	127.809.005.000
471	Kab. Intan Jaya	126.992.141.000	-	-	123.288.758.000	-	291.678.600	1.340.364.000	1.000.000.000	126.992.141.000
472	Kab. Deiyai	128.269.693.000	-	-	124.933.217.000	-	393.472.950	1.340.364.000	1.000.000.000	128.269.693.000
473	Provinsi Maluku Utara	824.350.680.000	-	-	793.375.834.000	226.569.000	5.435.447.400	-	1.000.000.000	824.350.680.000
474	Kab. Halmahera Tengah	1.245.397.436.000	-	-	1.236.458.662.000	111.020.000	927.587.700	4.483.952.000	1.000.000.000	1.245.397.436.000
475	Kota Ternate	99.575.972.000	-	-	96.769.020.000	27.755.000	-	2.387.735.000	-	99.537.822.500
476	Kab. Halmahera Barat	107.404.308.000	-	-	104.237.626.000	28.322.000	113.100.300	2.627.823.000	-	107.404.308.000
477	Kab. Halmahera Timur	641.347.860.000	-	-	633.293.442.000	28.322.000	316.500.000	4.437.869.000	-	641.347.860.000
478	Kab. Halmahera Selatan	498.466.608.000	-	-	478.189.216.000	481.460.000	-	13.958.502.000	2.503.807.000	495.733.648.050
479	Kab. Halmahera Utara	43.084.938.000	-	-	37.975.322.000	27.755.000	405.562.800	3.543.165.000	-	42.138.624.800
480	Kab. Kepulauan Sula	99.556.654.000	-	-	94.524.075.000	27.755.000	163.686.600	4.177.030.000	-	99.556.654.000
481	Kota Tidore Kepulauan	234.589.619.000	-	-	229.797.738.000	113.285.000	-	2.388.801.000	1.000.000.000	233.607.150.750
482	Kab. Pulau Morotai	101.670.179.000	-	-	97.983.600.000	28.322.000	-	3.283.064.000	-	101.469.455.750
483	Kab. Pulau Taliabu	147.216.506.000	-	-	136.023.029.000	27.755.000	-	3.639.652.000	-	144.513.672.600
484	Provinsi Banten	7.930.950.000	-	-	4.907.143.000	548.463.000	126.863.100	-	2.051.795.000	7.930.950.000
485	Kab. Lebak	16.864.826.000	-	-	3.114.642.000	7.577.316.000	125.159.400	1.706.567.000	4.036.587.000	16.864.826.000
486	Kab. Pandeglang	12.022.198.000	-	-	4.395.172.000	403.128.000	216.242.400	3.573.862.000	2.928.066.000	12.022.198.000
487	Kab. Serang	6.847.487.000	-	-	1.964.576.000	1.408.596.000	68.229.300	2.149.603.000	1.097.089.000	6.847.487.000
488	Kab. Tangerang	5.890.868.000	-	-	1.433.805.000	2.018.107.000	20.892.600	1.369.122.000	1.000.000.000	5.890.868.000
489	Kota Cilegon	1.940.279.000	-	-	314.603.000	136.957.000	15.200.400	1.437.859.000	-	1.940.279.000
490	Kota Tangerang	2.352.076.000	-	-	983.792.000	84.301.000	15.197.100	1.233.134.000	-	2.352.076.000
491	Kota Serang	1.752.262.000	-	-	309.010.000	136.957.000	15.200.400	1.255.435.000	-	1.752.262.000
492	Kota Tangerang Selatan	5.665.334.000	-	-	1.418.783.000	1.960.883.000	34.022.300	1.233.134.000	1.000.000.000	5.665.334.000
493	Provinsi Bangka Belitung	268.426.359.000	4.575.438.000	-	248.009.865.000	-	43.709.400	-	15.759.756.000	268.426.359.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi							
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)=(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)
494	Kab. Bangka	152.894.877.000	1.336.624.000	-	138.208.304.000	-	16.967.600	2.364.406.000	10.958.465.000	152.894.877.000
495	Kab. Belitung	107.180.458.000	1.358.837.000	-	93.841.266.000	-	11.191.700	4.303.045.000	7.657.672.000	107.180.458.000
496	Kota Pangkal Pinang	71.158.691.000	1.336.624.000	-	62.117.770.000	-	4.451.200	1.323.741.000	6.373.373.000	71.158.691.000
497	Kab. Bangka Selatan	155.178.405.000	1.336.624.000	-	141.362.043.000	-	1.476.600	3.461.349.000	9.012.456.000	155.178.405.000
498	Kab. Bangka Tengah	107.863.705.000	1.336.624.000	-	95.259.713.000	-	2.429.700	3.157.011.000	8.101.944.000	107.863.705.000
499	Kab. Bangka Barat	105.913.052.000	1.336.624.000	-	91.493.872.000	-	6.950.450	2.773.073.000	10.298.410.000	105.913.052.000
500	Kab. Belitung Timur	119.287.153.000	1.358.837.000	-	104.318.800.000	-	5.724.000	4.892.642.000	8.697.794.000	119.287.153.000
501	Provinsi Gorontalo	5.416.301.000	-	-	267.852.000	-	751.130.600	-	1.987.893.000	5.416.301.000
502	Kab. Boalemo	6.095.018.000	-	-	440.000	-	28.388.700	1.921.967.000	3.927.743.000	6.095.018.000
503	Kab. Gorontalo	3.590.990.000	-	-	797.765.000	-	14.653.800	1.593.976.000	1.000.000.000	3.590.990.000
504	Kota Gorontalo	1.556.629.000	-	-	32.000	-	12.052.500	1.363.752.000	-	1.556.629.000
505	Kab. Pohuwato	6.725.967.000	-	-	2.693.000	-	142.914.300	2.354.864.000	2.927.231.000	6.725.967.000
506	Kab. Bone Bolango	2.577.718.000	-	-	681.233.000	-	-	1.687.030.000	-	2.530.968.850
507	Kab. Gorontalo Utara	4.109.036.000	-	-	21.476.000	-	-	2.395.814.000	1.519.094.000	3.962.552.950
508	Provinsi Kepulauan Riau	409.402.406.000	93.519.246.000	303.658.020.000	8.326.339.000	-	454.731.550	-	2.055.414.000	409.402.406.000
509	Kab. Natuna	351.121.568.000	170.994.975.000	169.537.373.000	2.349.400.000	-	12.853.100	8.219.994.000	-	351.121.568.000
510	Kab. Kepulauan Anambas	253.149.041.000	106.779.919.000	137.269.388.000	2.341.054.000	-	13.120.900	6.738.442.000	-	253.149.041.000
511	Kab. Karimun	144.615.328.000	29.492.312.000	87.782.617.000	18.788.839.000	-	-	3.971.770.000	4.474.842.000	144.526.242.050
512	Kota Batam	133.725.586.000	29.685.677.000	97.606.757.000	2.602.230.000	-	29.944.850	3.775.415.000	-	133.725.586.000
513	Kota Tanjung Pinang	121.288.850.000	29.492.312.000	87.782.617.000	1.166.207.000	-	14.837.550	1.426.665.000	1.398.170.000	121.288.850.000
514	Kab. Lingga	129.182.621.000	29.492.312.000	87.782.617.000	3.735.769.000	-	-	7.862.157.000	-	128.919.474.600
515	Kab. Bintan	129.249.709.000	29.685.677.000	88.734.444.000	1.165.459.000	-	-	6.615.236.000	2.920.159.000	129.231.397.450
516	Provinsi Papua Barat	2.833.408.186.000	384.003.804.000	2.304.584.008.000	53.101.566.000	-	24.926.470.500	-	3.211.428.000	2.833.408.186.000
517	Kab. Fak Fak	119.389.023.000	4.047.552.000	81.488.718.000	4.918.855.000	-	4.157.013.900	5.095.765.000	1.000.000.000	119.389.023.000
518	Kab. Manokwari	61.481.966.000	2.730.376.000	44.835.367.000	4.952.079.000	-	-	2.287.290.000	4.800.122.000	59.890.658.900
519	Kab. Sorong	155.640.285.000	62.590.467.000	53.539.264.000	27.276.375.000	-	-	3.871.134.000	3.559.503.000	151.686.138.550
520	Kota Sorong	67.701.307.000	5.967.123.000	47.847.238.000	8.896.854.000	-	568.830.600	1.626.342.000	1.000.000.000	67.701.307.000
521	Kab. Raja Ampat	170.627.332.000	5.967.123.000	45.559.088.000	96.318.468.000	-	575.209.200	19.205.629.000	1.000.000.000	170.627.332.000
522	Kab. Sorong Selatan	110.798.308.000	7.284.300.000	83.579.841.000	8.890.109.000	-	842.933.100	2.379.859.000	5.739.744.000	108.831.464.100
523	Kab. Teluk Bintuni	1.031.797.621.000	24.886.536.000	955.048.502.000	8.890.109.000	-	5.422.857.000	3.728.420.000	3.113.717.000	1.031.797.621.000
524	Kab. Teluk Wondama	108.606.694.000	4.047.552.000	81.924.966.000	8.890.109.000	-	-	4.730.772.000	1.000.000.000	101.804.536.700
525	Kab. Kaimana	203.657.484.000	4.047.552.000	82.136.853.000	91.289.030.000	-	4.850.572.800	5.927.672.000	1.000.000.000	203.657.484.000
526	Kab. Maybrat	105.273.411.000	7.284.300.000	83.136.521.000	8.890.109.000	-	-	1.340.364.000	1.300.979.000	102.860.812.650
527	Kab. Tambrauw	107.243.495.000	7.284.300.000	83.711.429.000	8.890.109.000	-	-	2.957.358.000	1.215.429.000	104.793.546.800
528	Kab. Manokwari Selatan	101.757.559.000	4.047.552.000	82.332.324.000	8.890.109.000	-	1.033.476.300	1.866.160.000	1.000.000.000	101.757.559.000
529	Kab. Pegunungan Arfak	100.278.741.000	4.047.552.000	81.834.980.000	8.890.109.000	-	743.580.900	1.340.364.000	1.000.000.000	100.278.741.000
530	Provinsi Sulawesi Barat	9.350.176.000	-	-	134.634.000	-	164.100.600	-	8.653.679.000	9.350.176.000
531	Kab. Majene	3.810.475.000	-	-	6.047.000	-	13.919.700	1.963.166.000	1.794.766.000	3.810.475.000
532	Kab. Mamuju	10.058.262.000	-	-	410.214.000	-	-	4.215.883.000	5.166.022.000	9.832.133.100
533	Kab. Polewali Mandar	5.910.694.000	-	-	33.417.000	-	8.651.400	1.648.776.000	4.199.566.000	5.910.694.000
534	Kab. Mamasa	3.286.742.000	-	-	5.951.000	-	18.795.300	1.313.556.000	1.904.116.000	3.286.742.000
535	Kab. Pasangkayu	13.929.317.000	-	-	33.695.000	-	-	2.211.812.000	11.634.633.000	13.887.599.850
536	Kab. Mamuju Tengah	10.451.200.000	-	-	7.851.000	-	44.245.800	1.783.224.000	8.512.539.000	10.451.200.000
537	Provinsi Kalimantan Utara	895.347.322.000	9.921.043.000	593.046.000	811.139.496.000	-	18.341.505.600	-	10.410.950.000	895.347.322.000
538	Provinsi Papua Tengah	169.984.716.000	-	-	157.045.583.000	-	3.282.187.200	-	1.998.509.000	164.192.582.100

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi							
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)=(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)
539	Provinsi Papua Selatan	331.121.751.000	-	-	305.916.966.000	-	6.393.537.000	-	3.892.995.000	331.121.751.000
540	Provinsi Papua Pegunungan	150.037.226.000	-	-	138.616.484.000	-	2.897.026.800	-	1.763.986.000	144.924.791.400
541	Provinsi Papua Barat Daya	1.078.754.794.000	197.528.235.000	840.891.756.000	9.308.228.000	-	8.682.578.400	-	2.084.647.000	1.078.754.794.000
542	Kab. Bulungan	758.505.789.000	15.620.471.000	1.353.314.000	714.680.169.000	-	4.507.166.100	3.042.357.000	8.764.501.000	758.505.789.000
543	Kab. Malinau	1.478.569.620.000	19.252.455.000	11.843.237.000	1.418.257.583.000	-	4.398.088.500	1.340.364.000	11.087.932.000	1.478.569.620.000
544	Kab. Nunukan	738.149.894.000	7.262.725.000	652.673.000	707.015.764.000	-	1.879.215.300	2.243.929.000	14.696.972.000	738.149.894.000
545	Kota Tarakan	292.410.003.000	19.316.694.000	758.369.000	263.757.371.000	-	572.512.200	1.636.962.000	5.022.898.000	292.410.003.000
546	Kab. Tana Tidung	848.330.487.000	6.078.944.000	461.240.000	825.559.260.000	-	2.405.285.700	1.834.243.000	6.368.685.000	848.330.487.000
Jumlah		136.074.204.302.000	16.491.258.147.000	11.738.041.628.000	99.425.415.550.000	2.005.232.650.000	739.626.551.900	1.095.637.785.000	3.204.776.508.000	135.944.555.602.100

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAU Block Grant		DAU Specific Grant										Pagu	Realisasi
				Formasi PPPK		Bidang Pendidikan		Bidang Kesehatan		Kelurahan		Bidang Pekerjaan Umum			
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(5)+(7)+(9)+(11)+(13)+(15)	(18)=(6)+(8)+(10)+(12)+(14)+(16)
1	Provinsi Aceh	1.439.189.800.000	1.439.189.800.000	263.829.432.000	263.829.432.000	186.727.974.000	186.727.974.000	78.945.365.000	78.945.365.000	-	-	47.263.711.000	47.263.711.000	2.015.956.282.000	2.015.956.282.000
2	Kab. Aceh Barat	416.743.122.000	416.743.122.000	19.862.052.000	19.862.052.000	44.519.055.000	44.519.055.000	48.849.150.000	48.849.150.000	-	-	32.886.470.000	32.886.470.000	562.859.849.000	562.859.849.000
3	Kab. Aceh Besar	622.855.520.000	622.855.520.000	9.754.266.000	9.754.266.000	49.366.713.000	49.366.713.000	61.559.661.000	61.559.661.000	-	-	29.838.030.000	29.838.030.000	773.374.190.000	773.374.190.000
4	Kab. Aceh Selatan	446.156.457.000	446.156.457.000	13.731.264.000	13.731.264.000	49.141.235.000	49.141.235.000	62.427.659.000	62.427.659.000	-	-	45.345.403.000	45.345.403.000	616.802.018.000	616.802.018.000
5	Kab. Aceh Singkil	295.570.416.000	295.570.416.000	25.847.160.000	25.847.160.000	45.216.488.000	45.216.488.000	34.521.484.000	34.521.484.000	-	-	20.889.610.000	20.889.610.000	422.045.158.000	422.045.158.000
6	Kab. Aceh Tengah	438.296.304.000	438.296.304.000	34.143.480.000	34.143.480.000	31.691.215.000	31.691.215.000	47.220.959.000	47.220.959.000	-	-	34.111.760.000	34.111.760.000	585.463.718.000	585.463.718.000
7	Kab. Aceh Tenggara	384.971.636.000	384.971.636.000	32.666.448.000	32.666.448.000	58.954.698.000	58.954.698.000	43.038.772.000	43.038.772.000	-	-	43.635.105.000	43.635.105.000	563.266.659.000	563.266.659.000
8	Kab. Aceh Timur	532.669.782.000	532.669.782.000	51.047.322.000	51.047.322.000	94.080.582.000	94.080.582.000	62.852.011.000	62.852.011.000	-	-	55.467.749.000	55.467.749.000	796.117.446.000	796.117.446.000
9	Kab. Aceh Utara	684.344.956.000	684.344.956.000	25.908.420.000	25.908.420.000	97.866.928.000	97.866.928.000	73.447.902.000	73.447.902.000	-	-	53.020.103.000	53.020.103.000	934.588.309.000	934.588.309.000
10	Kab. Bireuen	638.520.369.000	638.520.369.000	40.796.178.000	40.796.178.000	59.567.474.000	59.567.474.000	54.305.403.000	54.305.403.000	-	-	36.105.518.000	36.105.518.000	829.294.942.000	829.294.942.000
11	Kab. Pidie	651.348.013.000	651.348.013.000	23.245.080.000	23.245.080.000	66.564.201.000	66.564.201.000	82.082.179.000	82.082.179.000	-	-	36.830.672.000	36.830.672.000	860.070.145.000	860.070.145.000
12	Kab. Simeulue	266.408.946.000	266.408.946.000	40.231.416.000	40.231.416.000	47.890.291.000	47.890.291.000	38.976.061.000	38.976.061.000	-	-	41.374.203.000	41.374.203.000	434.880.917.000	434.880.917.000
13	Kota Banda Aceh	467.510.751.000	467.510.751.000	37.936.488.000	37.936.488.000	12.473.425.000	12.473.425.000	32.890.784.000	32.890.784.000	-	-	7.300.000.000	7.300.000.000	558.111.448.000	558.111.448.000
14	Kota Sabang	313.697.676.000	313.697.676.000	2.678.220.000	2.678.220.000	-	-	23.331.207.000	23.331.207.000	-	-	7.300.000.000	7.300.000.000	347.007.103.000	347.007.103.000
15	Kota Langsa	335.415.510.000	335.415.510.000	10.704.468.000	10.704.468.000	32.062.279.000	32.062.279.000	33.572.091.000	33.572.091.000	-	-	10.736.949.000	10.736.949.000	422.491.297.000	422.491.297.000
16	Kota Lhokseumawe	356.529.608.000	356.529.608.000	20.678.280.000	20.678.280.000	23.803.814.000	23.803.814.000	26.338.183.000	26.338.183.000	-	-	9.019.574.000	9.019.574.000	436.369.459.000	436.369.459.000
17	Kab. Gayo Lues	271.637.748.000	271.637.748.000	27.655.032.000	27.655.032.000	37.429.381.000	37.429.381.000	36.056.226.000	36.056.226.000	-	-	62.644.086.000	62.644.086.000	435.422.473.000	435.422.473.000
18	Kab. Aceh Barat Daya	285.429.023.000	285.429.023.000	14.525.688.000	14.525.688.000	46.661.365.000	46.661.365.000	41.453.553.000	41.453.553.000	-	-	38.006.930.000	38.006.930.000	426.076.559.000	426.076.559.000
19	Kab. Aceh Jaya	272.783.499.000	272.783.499.000	23.711.106.000	23.711.106.000	45.403.939.000	45.403.939.000	33.208.886.000	33.208.886.000	-	-	33.061.449.000	33.061.449.000	408.168.879.000	408.168.879.000
20	Kab. Nagan Raya	350.930.317.000	350.930.317.000	21.059.352.000	21.059.352.000	44.731.644.000	44.731.644.000	36.267.212.000	36.267.212.000	-	-	41.126.354.000	41.126.354.000	494.114.879.000	494.114.879.000
21	Kab. Aceh Tamiang	375.794.826.000	375.794.826.000	30.521.448.000	30.521.448.000	33.625.553.000	33.625.553.000	37.458.532.000	37.458.532.000	-	-	28.677.725.000	28.677.725.000	506.078.084.000	506.078.084.000
22	Kab. Bener Meriah	279.451.897.000	279.451.897.000	45.286.320.000	45.286.320.000	29.084.595.000	29.084.595.000	29.118.031.000	29.118.031.000	-	-	50.105.482.000	50.105.482.000	433.046.325.000	433.046.325.000
23	Kab. Pidie Jaya	337.928.239.000	337.928.239.000	8.804.622.000	8.804.622.000	17.038.766.000	17.038.766.000	31.564.814.000	31.564.814.000	-	-	23.933.270.000	23.933.270.000	419.269.711.000	419.269.711.000
24	Kota Subulussalam	245.099.600.000	245.099.600.000	5.871.150.000	5.871.150.000	24.520.779.000	24.520.779.000	30.653.193.000	30.653.193.000	-	-	24.945.545.000	24.945.545.000	331.090.267.000	331.090.267.000
25	Provinsi Sumatera Utara	2.052.024.830.000	2.052.024.830.000	188.063.406.000	188.063.406.000	297.981.747.000	297.981.747.000	112.711.014.000	112.711.014.000	-	-	32.265.683.000	32.265.683.000	2.683.046.680.000	2.683.046.680.000
26	Kab. Asahan	652.928.247.000	652.928.247.000	39.110.766.000	39.110.766.000	75.287.781.000	75.287.781.000	75.620.835.000	75.620.835.000	5.400.000.000	5.400.000.000	25.823.455.000	25.823.455.000	874.171.084.000	874.171.084.000
27	Kab. Dairi	403.982.487.000	403.982.487.000	39.063.594.000	39.063.594.000	66.469.426.000	66.469.426.000	39.385.958.000	39.385.958.000	1.600.000.000	1.600.000.000	39.534.978.000	39.534.978.000	590.036.443.000	590.036.443.000
28	Kab. Deli Serdang	1.239.818.720.000	1.239.818.720.000	22.066.506.000	22.066.506.000	138.208.615.000	138.208.615.000	88.099.331.000	88.099.331.000	2.800.000.000	2.800.000.000	16.834.709.000	16.834.709.000	1.507.827.881.000	1.507.827.881.000
29	Kab. Karo	524.003.702.000	524.003.702.000	34.473.960.000	34.473.960.000	87.038.957.000	87.038.957.000	39.014.334.000	39.014.334.000	2.000.000.000	2.000.000.000	27.134.505.000	27.134.505.000	713.665.458.000	713.665.458.000
30	Kab. Labuhanbatu	489.647.678.000	489.647.678.000	42.399.882.000	42.399.882.000	65.937.411.000	65.937.411.000	50.803.909.000	50.803.909.000	4.600.000.000	4.600.000.000	20.944.539.000	20.944.539.000	674.333.419.000	674.333.419.000
31	Kab. Langkat	849.574.391.000	849.574.391.000	72.604.788.000	72.604.788.000	122.393.816.000	122.393.816.000	99.418.861.000	99.418.861.000	7.400.000.000	7.400.000.000	23.946.852.000	23.946.852.000	1.175.338.708.000	1.175.338.708.000
32	Kab. Mandailing Natal	497.675.132.000	497.675.132.000	49.904.262.000	49.904.262.000	91.060.402.000	91.060.402.000	77.022.006.000	77.022.006.000	5.400.000.000	5.376.683.206	64.256.850.000	64.256.850.000	785.318.652.000	785.295.335.206
33	Kab. Nias	258.641.079.000	258.641.079.000	25.721.178.000	25.721.178.000	75.470.896.000	75.470.896.000	27.209.218.000	27.209.218.000	-	-	43.398.278.000	43.398.278.000	430.440.649.000	430.440.649.000
34	Kab. Simalungun	886.475.517.000	886.475.517.000	66.144.486.000	66.144.486.000	138.153.065.000	138.135.535.460	74.245.589.000	74.236.590.082	5.400.000.000	5.400.000.000	33.447.011.000	33.434.880.000	1.203.865.668.000	1.203.827.008.542
35	Kab. Tapanuli Selatan	408.036.037.000	408.036.037.000	36.174.876.000	36.174.876.000	66.574.640.000	66.574.640.000	57.716.402.000	57.716.402.000	7.400.000.000	7.200.000.000	45.382.118.000	45.382.118.000	621.284.073.000	621.084.073.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	423.580.444.000	423.580.444.000	42.259.098.000	42.259.098.000	74.792.293.000	74.792.293.000	55.375.522.000	55.375.522.000	11.200.000.000	11.200.000.000	25.186.696.000	25.186.696.000	632.394.053.000	632.394.053.000
37	Kab. Tapanuli Utara	419.330.188.000	419.330.188.000	96.864.240.000	96.864.240.000	36.666.651.000	36.666.651.000	44.472.617.000	44.472.617.000	2.200.000.000	2.200.000.000	28.163.224.000	28.163.224.000	627.696.920.000	627.696.920.000
38	Kab. Toba Samosir	390.202.057.000	390.202.057.000	30.311.646.000	30.311.646.000	50.341.416.000	50.341.416.000	33.012.933.000	33.012.933.000	2.600.000.000	2.600.000.000	27.481.740.000	27.481.740.000	533.949.792.000	533.949.792.000
39	Kota Binjai	468.683.912.000	468.683.912.000	19.035.450.000	19.035.450.000	32.941.310.000	27.623.050.304	28.049.138.000	28.049.138.000	7.400.000.000	7.400.000.000	-	-	556.109.810.000	550.791.550.304
40	Kota Medan	1.395.962.151.000	1.395.962.151.000	78.435.648.000	78.435.648.000	93.202.829.000	93.202.829.000	73.579.860.000	73.579.860.000	30.200.000.000	30.200.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	1.678.680.488.000	1.678.680.488.000
41	Kota Pematang Siantar	460.111.151.000	460.111.151.000	33.327.114.000	33.327.114.000	43.909.535.000	43.909.535.000	21.011.390.000	21.011.390.000	10.600.000.000	10.600.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	576.259.190.000	576.259.190.000
42	Kota Sibolga	339.374.560.000	339.374.560.000	5.164.734.000	5.164.734.000	11.879.290.000	11.879.290.000	32.358.713.000	32.358.713.000	3.400.000.000	3.400.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	399.477.297.000	399.477.297.000
43	Kota Tanjung Balai	301.210.628.000	301.210.628.000	14.165.130.000	14.165.130.000	41.136.400.000	41.136.400.000	46.418.593.000	46.418.593.000	6.200.000.000	6.200.000.000	9.084.984.000	9.084.984.000	418.215.735.000	418.215.735.000
44	Kota Tebing Tinggi	321.460.100.000	321.460.100.000	10.393.548.000	10.393.548.000	32.238.857.000	32.238.857.000	25.881.854.000	25.881.854.000	7.000.000.000	6.981.386.323	7.300.000.000	7.300.000.000	404.274.359.000	404.255.745.323
45	Kota Padang Sidempuan	389.919.439.000	389.919.439.000	5.006.040.000	5.006.040.000	26.824.340.000	26.824.340.000	38.180.500.000	38.180.500.000	7.400.000.000	7.400.000.000	20.412.493.000	20.412.493.000	487.742.812.000	487.742.812.000
46	Kab. Pakpak Bharat	225.826.422.000	225.826.422.000	10.876.872.000	10.876.872.000	22.350.731.000	22.350.731.000	24.010.010.000	24.010.010.000	-	-	50.736.530.000	50.736.530.000	333.800.565.000	333.800.565.000
47	Kab. Nias Selatan	385.057.765.000	385.057.765.000	61.996.320.000	61.996.320.000	117.661.747.000	117.661.747.000	53.315.829.000	53.315.829.000	400.000.000	400.000.000	30.388.973.000	30.388.973.000	648.820.634.000	648.820.634.000
48	Kab. Humbang Hasundutan	389.526.567.000	389.526.567.000	21.949.752.000	21.949.752.000	28.746.893.000	28.746.893.000	32.886.518.000	32.886.518.000	200.000.000	200.000.000	30.129.408.000	30.129.408.000	503.439.138.000	503.439.138.000
49	Kab. Serdang Bedagai	562.926.532.000	562.926.532.000	53.484.150.000	53.484.150.000	75.624.637.000	75.624.637.000	63.896.128.000	63.896.128.000	1.200.000.000	1.200.000.000	11.602.407.000	11.602.407.000	768.733.854.000	768.733.854.000
50	Kab. Samosir	316.797.237.000	316.797.237.000	20.870.004.000	20.870.004.000	36.929.507.000	36.929.507.000	21.913.537.000	21.913.537.000	1.200.000.000	600.000.000	35.523.213.000	35.523.213.000	433.233.498.000	432.633.498.000
51	Kab. Batu Bara	435.536.979.000	435.536.979.000	34.210.236.000	34.210.236.000	51.027.180.000	51.027.180.000	53.149.329.000	53.149.329.000	2.000.000.000	2.000.000.000	9.095.097.000	9.095.097.000	585.018.821.000	585.018.821.000
52	Kab. Padang Lawas	332.382.877.000	332.382.877.000	40.520.454.000	40.520.454.000	56.671.315.000	56.671.315.000	42.401.991.000	42.401.991.000	200.000.000	200.000.000	40.237.586.000	40.237.586.000	512.414.223.000	512.414.223.000
53	Kab. Padang Lawas Utara	377.048.468.000	377.048.468.000	26.549.466.000	26.549.466.000	41.297.339.000	41.297.339.000	43.897.436.000	43.897.436.000	400.000.000	400.000.000	47.006.230.000	47.006.230.000	536.198.939.000	536.198.939.000
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	379.012.162.000	379.012.162.000	28.995.348.000	28.995.348.000	24.037.137.000	24.037.137.000	38.933.859.000	38.933.859.000	400.000.000	400.000.000	24.304.577.000	24.304.577.000	495.683.083.000	495.683.083.000
55	Kab. Labuhanbatu Utara	428.912.482.000	428.912.482.000	10.706.016.000	10.706.016.000	67.260.622.000	67.260.622.000	44.266.633.000	44.266.633.000	1.600.000.000	1.600.000.000	27.734.827.000	27.734.827.000	580.480.580.000	580.480.580.000
56	Kab. Nias Utara	261.003.065.000	261.003.065.000	18.113.022.000	18.113.022.000	49.327.176.000	49.327.176.000	26.493.902.000	26.493.902.000	200.000.000	200.000.000	51.380.211.000	51.380.211.000	406.517.376.000	406.517.376.000
57	Kab. Nias Barat	206.293.371.000	206.293.371.000	24.409.806.000	24.409.806.000	49.707.427.000	49.707.427.000	22.914.541.000	22.914.541.000	-	-	44.533.689.000	44.533.689.000	347.858.834.000	347.858.834.000
58	Kota Gunungsitoli	307.259.051.000	307.259.051.000	13.453.872.000	13.453.872.000	49.861.470.000	49.861.470.000	22.003.345.000	22.003.345.000	600.000.000	600.000.000	23.769.783.000	23.769.783.000	416.947.521.000	416.947.521.000
59	Provinsi Sumatera Barat	1.525.612.864.000	1.525.612.864.000	150.932.616.000	150.932.616.000	188.817.634.000	188.817.634.000	75.568.762.000	75.568.762.000	-	-	48.415.801.000	48.415.801.000	1.989.347.677.000	1.989.347.677.000
60	Kab. Lima Puluh Kota	504.849.583.000	504.849.583.000	38.526.132.000	38.526.132.000	87.656.555.000	87.656.555.000	50.733.646.000	50.733.646.000	-	-	38.467.341.000	38.467.341.000	720.233.257.000	720.233.257.000
61	Kab. Agam	576.021.390.000	576.021.390.000	47.700.138.000	47.700.138.000	88.448.097.000	88.448.097.000	39.213.805.000	39.213.805.000	-	-	34.159.156.000	34.159.156.000	785.542.586.000	785.542.586.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	295.399.171.000	295.399.171.000	23.405.580.000	23.405.580.000	94.052.810.000	94.052.810.000	41.065.314.000	41.065.314.000	-	-	116.667.526.000	116.667.526.000	570.590.401.000	570.590.401.000
63	Kab. Padang Pariaman	476.113.755.000	476.113.755.000	76.709.160.000	76.709.160.000	80.667.683.000	80.667.683.000	54.404.565.000	54.404.565.000	-	-	56.514.197.000	56.514.197.000	744.409.360.000	744.409.360.000
64	Kab. Pasaman	359.978.594.000	359.978.594.000	54.191.226.000	54.191.226.000	74.708.251.000	74.708.251.000	48.699.141.000	48.699.141.000	-	-	33.465.841.000	33.465.841.000	571.043.053.000	571.043.053.000
65	Kab. Pesisir Selatan	525.089.855.000	525.089.855.000	94.070.928.000	94.070.928.000	96.686.377.000	96.686.377.000	48.468.088.000	48.468.088.000	-	-	63.033.963.000	63.033.963.000	827.349.211.000	827.349.211.000
66	Kab. Sijunjung	323.832.029.000	323.832.029.000	47.195.292.000	47.195.292.000	69.093.204.000	69.093.204.000	43.683.380.000	43.683.380.000	-	-	41.755.843.000	41.755.843.000	525.559.748.000	525.559.748.000
67	Kab. Solok	470.709.219.000	470.709.219.000	30.134.814.000	30.134.814.000	87.769.796.000	87.769.796.000	53.761.902.000	53.761.902.000	-	-	38.815.792.000	38.815.792.000	681.191.523.000	681.191.523.000
68	Kab. Tanah Datar	446.933.380.000	446.933.380.000	56.756.958.000	56.756.958.000	77.528.023.000	77.528.023.000	46.073.964.000	46.073.964.000	-	-	40.725.140.000	40.725.140.000	668.017.465.000	668.017.465.000
69	Kota Bukit Tinggi	363.246.863.000	363.246.863.000	18.935.142.000	18.935.142.000	28.212.912.000	28.212.912.000	13.829.810.000	13.829.810.000	4.800.000.000	4.800.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	436.324.727.000	436.324.727.000
70	Kota Padang Panjang	285.933.849.000	285.933.849.000	9.430.194.000	9.430.194.000	38.962.388.000	38.962.388.000	16.512.889.000	16.512.889.000	3.200.000.000	3.200.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	361.339.320.000	361.339.320.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAU Block Grant		DAU Specific Grant										Pagu	Realisasi
				Formasi PPPK		Bidang Pendidikan		Bidang Kesehatan		Kelurahan		Bidang Pekerjaan Umum			
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	)=(5)+(7)+(9)+(11)+(13)+(	(18)=(6)+(8)+(10)+(12)+(14)+(16)
71	Kota Padang	946.262.396.000	946.262.396.000	35.036.814.000	35.036.814.000	51.031.275.000	51.031.275.000	43.109.573.000	43.109.573.000	20.800.000.000	20.800.000.000	19.820.662.000	19.820.662.000	1.116.060.720.000	1.116.060.720.000
72	Kota Payakumbuh	326.215.172.000	326.215.172.000	22.536.582.000	22.536.582.000	51.264.626.000	51.264.626.000	14.979.981.000	14.979.981.000	9.400.000.000	9.400.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	431.696.361.000	431.696.361.000
73	Kota Sawahlunto	276.937.890.000	276.937.890.000	20.519.466.000	20.519.466.000	11.539.812.000	11.539.812.000	21.707.230.000	21.707.230.000	2.000.000.000	2.000.000.000	23.574.052.000	23.574.052.000	356.278.450.000	356.278.450.000
74	Kota Solok	305.717.182.000	305.717.182.000	4.021.278.000	4.021.278.000	50.912.864.000	50.912.864.000	13.706.825.000	13.706.825.000	2.600.000.000	2.600.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	384.258.149.000	384.258.149.000
75	Kota Pariaman	333.752.022.000	333.752.022.000	647.454.000	647.454.000	27.412.935.000	27.412.935.000	26.913.191.000	26.913.191.000	3.200.000.000	3.200.000.000	8.189.993.000	8.189.993.000	400.115.595.000	400.115.595.000
76	Kab. Pasaman Barat	421.096.913.000	421.096.913.000	69.215.220.000	69.215.220.000	68.489.810.000	68.489.810.000	53.270.838.000	53.270.838.000	-	-	23.060.632.000	23.060.632.000	635.133.413.000	635.133.413.000
77	Kab. Dharmasraya	300.805.012.000	300.805.012.000	58.668.492.000	58.668.492.000	66.922.648.000	66.922.648.000	26.329.033.000	26.329.033.000	-	-	36.422.199.000	36.422.199.000	489.147.384.000	489.147.384.000
78	Kab. Solok Selatan	322.936.444.000	322.936.444.000	4.139.460.000	4.139.460.000	42.224.903.000	42.224.903.000	34.280.880.000	34.280.880.000	-	-	49.172.098.000	49.172.098.000	452.753.785.000	452.753.785.000
79	Provinsi Riau	863.405.587.000	863.405.587.000	394.080.408.000	394.080.408.000	161.687.424.000	161.687.424.000	36.883.467.000	36.883.467.000	-	-	50.265.512.000	50.265.512.000	1.506.322.398.000	1.506.322.398.000
80	Kab. Bengkalis	172.525.483.000	172.525.483.000	114.113.460.000	114.113.460.000	32.948.798.000	32.948.798.000	20.974.762.000	20.974.762.000	3.800.000.000	3.800.000.000	10.080.911.000	10.080.911.000	354.443.414.000	354.443.414.000
81	Kab. Indragiri Hilir	624.923.408.000	624.923.408.000	53.744.460.000	53.744.460.000	123.008.150.000	123.008.150.000	82.593.063.000	82.593.063.000	7.800.000.000	7.800.000.000	33.202.124.000	33.202.124.000	925.271.205.000	925.271.205.000
82	Kab. Indragiri Hulu	449.034.165.000	449.034.165.000	39.455.694.000	39.455.694.000	86.891.578.000	86.891.578.000	42.499.217.000	42.499.217.000	3.200.000.000	3.200.000.000	38.921.283.000	38.921.283.000	660.001.937.000	660.001.937.000
83	Kab. Kampar	571.421.590.000	571.421.590.000	57.814.458.000	57.814.458.000	111.231.358.000	111.231.358.000	53.021.746.000	53.021.746.000	1.600.000.000	1.600.000.000	26.640.442.000	26.640.442.000	821.729.594.000	821.729.594.000
84	Kab. Kuantan Singingi	465.873.746.000	465.873.746.000	11.017.332.000	11.017.332.000	57.564.583.000	57.564.583.000	44.865.191.000	44.865.191.000	2.200.000.000	2.200.000.000	39.534.055.000	39.534.055.000	621.054.907.000	621.054.907.000
85	Kab. Pelalawan	404.231.693.000	404.231.693.000	71.656.872.000	71.656.872.000	76.245.243.000	76.245.243.000	36.152.718.000	36.152.718.000	2.800.000.000	2.800.000.000	26.985.821.000	26.985.821.000	618.072.347.000	618.072.347.000
86	Kab. Rokan Hilir	327.719.663.000	327.719.663.000	63.350.262.000	63.350.262.000	83.620.682.000	83.620.682.000	36.884.904.000	36.884.904.000	5.000.000.000	5.000.000.000	28.026.236.000	28.026.236.000	544.601.747.000	544.601.747.000
87	Kab. Rokan Hulu	444.642.065.000	444.642.065.000	61.500.480.000	61.500.480.000	87.859.399.000	87.859.399.000	43.994.594.000	43.994.594.000	1.200.000.000	600.000.000	40.448.012.000	40.448.012.000	679.644.550.000	679.044.550.000
88	Kab. Siak	208.775.136.000	208.775.136.000	93.321.288.000	93.321.288.000	42.120.808.000	42.120.808.000	21.054.339.000	21.054.339.000	1.800.000.000	893.658.000	32.564.406.000	32.564.406.000	399.635.977.000	398.729.635.000
89	Kota Dumai	340.058.497.000	340.058.497.000	21.864.942.000	21.864.942.000	36.960.626.000	36.960.626.000	26.311.636.000	26.311.636.000	7.200.000.000	7.200.000.000	16.666.320.000	16.666.320.000	449.062.021.000	449.062.021.000
90	Kota Pekanbaru	696.249.267.000	696.249.267.000	40.500.588.000	40.500.588.000	62.971.042.000	62.971.042.000	44.333.926.000	44.333.926.000	16.600.000.000	16.600.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	867.954.823.000	867.954.823.000
91	Kab. Kepulauan Meranti	276.580.170.000	276.580.170.000	43.582.980.000	43.582.980.000	32.537.272.000	32.537.272.000	34.745.471.000	34.745.070.790	1.000.000.000	940.702.690	34.104.193.000	34.104.193.000	422.550.086.000	422.490.388.480
92	Provinsi Jambi	1.024.145.034.000	1.024.145.034.000	68.565.648.000	68.565.648.000	166.314.560.000	166.314.560.000	38.818.405.000	38.818.405.000	-	-	32.011.448.000	32.011.448.000	1.329.855.095.000	1.329.855.095.000
93	Kab. Batanghari	392.896.799.000	392.896.799.000	54.853.104.000	54.853.104.000	60.424.608.000	60.424.608.000	38.131.243.000	38.131.243.000	2.800.000.000	2.800.000.000	35.102.806.000	35.102.806.000	584.208.560.000	584.208.560.000
94	Kab. Bungo	419.058.477.000	419.058.477.000	30.545.130.000	30.545.130.000	81.067.587.000	46.766.520.924	53.271.095.000	53.271.095.000	2.400.000.000	2.400.000.000	23.691.109.000	23.691.109.000	610.033.398.000	575.732.331.924
95	Kab. Kerinci	414.701.398.000	414.701.398.000	36.670.206.000	36.670.206.000	49.730.045.000	49.730.045.000	41.831.823.000	41.831.823.000	400.000.000	400.000.000	38.082.516.000	38.082.516.000	581.415.988.000	581.415.988.000
96	Kab. Merangin	463.945.682.000	463.945.682.000	49.615.098.000	49.615.098.000	91.905.334.000	91.905.334.000	41.289.798.000	41.289.798.000	2.000.000.000	2.000.000.000	38.068.291.000	38.068.291.000	686.824.203.000	686.824.203.000
97	Kab. Muaro Jambi	485.561.145.000	485.561.145.000	31.866.486.000	31.866.486.000	59.821.362.000	59.821.362.000	40.121.542.000	40.121.542.000	1.000.000.000	1.000.000.000	29.908.860.000	29.908.860.000	648.279.395.000	648.279.395.000
98	Kab. Sarolangun	376.768.310.000	376.768.310.000	23.973.000.000	23.973.000.000	70.719.939.000	70.719.939.000	40.598.077.000	40.598.077.000	1.800.000.000	1.800.000.000	37.889.342.000	37.889.342.000	551.748.668.000	551.748.668.000
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	326.308.650.000	326.308.650.000	38.140.470.000	38.140.470.000	52.385.545.000	52.385.545.000	40.139.114.000	40.139.114.000	4.000.000.000	4.000.000.000	35.622.529.000	35.622.529.000	496.596.308.000	496.596.308.000
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	351.615.744.000	351.615.744.000	25.235.928.000	25.235.928.000	60.879.921.000	60.879.921.000	46.339.610.000	46.339.610.000	4.000.000.000	4.000.000.000	44.941.742.000	44.941.742.000	533.012.945.000	533.012.945.000
101	Kab. Tebo	383.710.554.000	383.710.554.000	33.043.488.000	33.043.488.000	69.632.616.000	69.632.616.000	39.131.759.000	39.131.759.000	1.400.000.000	1.400.000.000	24.343.455.000	24.343.455.000	551.261.872.000	551.261.872.000
102	Kota Jambi	557.054.785.000	557.054.785.000	38.828.256.000	38.828.256.000	60.185.950.000	60.185.948.531	35.119.452.000	35.119.443.028	12.400.000.000	12.399.997.914	7.300.000.000	7.300.000.000	710.888.443.000	710.888.430.473
103	Kota Sungai Penuh	352.268.055.000	352.268.055.000	15.443.610.000	15.443.610.000	22.956.700.000	22.956.700.000	22.681.234.000	22.681.234.000	800.000.000	800.000.000	8.356.186.000	8.356.186.000	422.505.785.000	422.505.785.000
104	Provinsi Sumatera Selatan	1.155.419.240.000	1.155.419.240.000	199.721.286.000	199.721.286.000	210.497.199.000	210.497.199.000	62.160.108.000	62.160.108.000	-	-	25.968.355.000	25.968.355.000	1.653.766.188.000	1.653.766.188.000
105	Kab. Lahat	456.694.809.000	456.694.809.000	74.978.976.000	74.978.976.000	34.658.425.000	34.658.425.000	61.435.321.000	61.435.321.000	3.600.000.000	3.400.000.000	38.347.826.000	38.347.826.000	669.715.357.000	669.515.357.000
106	Kab. Musi Banyuasin	223.221.907.000	223.221.907.000	71.805.288.000	71.805.288.000	61.284.352.000	61.284.352.000	31.664.239.000	31.664.239.000	2.600.000.000	2.600.000.000	11.284.885.000	11.284.885.000	401.860.671.000	401.860.671.000
107	Kab. Musi Rawas	466.353.013.000	466.353.013.000	13.692.060.000	13.692.060.000	48.324.918.000	48.324.918.000	48.895.810.000	48.895.810.000	2.600.000.000	2.600.000.000	34.352.807.000	34.352.807.000	614.218.608.000	614.218.608.000
108	Kab. Muara Enim	407.278.594.000	407.278.594.000	73.176.306.000	73.176.306.000	85.942.315.000	85.942.315.000	49.791.104.000	49.791.104.000	2.000.000.000	2.000.000.000	19.146.307.000	19.146.307.000	637.334.626.000	637.334.626.000
109	Kab. Ogan Komering Ilir	638.087.648.000	638.087.648.000	111.774.234.000	111.774.234.000	154.994.630.000	154.994.630.000	79.665.439.000	79.665.439.000	2.600.000.000	2.600.000.000	42.723.851.000	42.723.851.000	1.029.845.802.000	1.029.845.802.000
110	Kab. Ogan Komering Ulu	405.144.108.000	405.144.108.000	47.749.476.000	47.749.476.000	83.747.896.000	83.747.896.000	49.350.589.000	49.350.589.000	2.800.000.000	2.800.000.000	28.571.906.000	28.571.906.000	617.363.975.000	617.363.975.000
111	Kota Palembang	833.344.040.000	833.344.040.000	203.296.452.000	203.296.452.000	162.192.375.000	162.192.375.000	91.944.485.000	91.944.485.000	21.400.000.000	10.700.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	1.319.477.352.000	1.308.777.352.000
112	Kota Prabumulih	289.040.851.000	289.040.851.000	42.113.466.000	42.113.466.000	34.955.452.000	34.955.452.000	27.311.248.000	27.311.248.000	6.600.000.000	6.600.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	407.321.017.000	407.321.017.000
113	Kota Pagar Alam	283.156.691.000	283.156.691.000	7.570.680.000	7.570.680.000	27.859.070.000	27.859.070.000	33.309.625.000	33.309.625.000	7.000.000.000	3.500.000.000	24.212.416.000	24.212.416.000	383.108.482.000	379.608.482.000
114	Kota Lubuk Linggau	340.340.578.000	340.340.578.000	9.028.110.000	9.028.110.000	54.146.751.000	54.146.751.000	35.421.954.000	35.421.954.000	14.400.000.000	14.400.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	460.637.393.000	460.637.393.000
115	Kab. Banyuasin	627.219.973.000	627.219.973.000	77.729.790.000	77.729.790.000	139.853.151.000	139.853.151.000	74.669.485.000	74.669.485.000	3.400.000.000	3.400.000.000	25.739.855.000	25.739.855.000	948.612.254.000	948.612.254.000
116	Kab. Ogan Ilir	393.146.081.000	393.146.081.000	45.756.192.000	45.756.192.000	83.280.849.000	83.280.849.000	59.329.046.000	59.329.046.000	2.800.000.000	2.800.000.000	22.368.716.000	22.368.716.000	606.680.884.000	606.680.884.000
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	580.267.538.000	580.267.538.000	24.388.494.000	24.388.494.000	107.553.037.000	107.553.037.000	64.385.498.000	64.385.498.000	1.400.000.000	1.400.000.000	16.110.760.000	16.110.760.000	794.105.327.000	794.105.327.000
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	419.498.294.000	419.498.294.000	36.584.028.000	36.584.028.000	69.310.824.000	69.310.824.000	57.437.901.000	57.437.901.000	1.400.000.000	1.400.000.000	21.480.095.000	21.480.095.000	605.711.142.000	605.711.142.000
119	Kab. Empat Lawang	287.091.559.000	287.091.559.000	15.335.208.000	15.335.208.000	42.464.976.000	42.464.976.000	43.221.647.000	43.221.647.000	1.800.000.000	1.800.000.000	27.120.804.000	27.120.804.000	417.034.194.000	417.034.194.000
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	190.392.501.000	190.392.501.000	43.551.216.000	43.551.216.000	39.055.439.000	39.055.439.000	24.010.720.000	24.010.720.000	1.200.000.000	1.200.000.000	9.924.934.000	9.924.934.000	308.134.810.000	308.134.810.000
121	Kab. Musi Rawas Utara	256.754.122.000	256.754.122.000	19.558.410.000	19.558.410.000	46.723.166.000	46.723.166.000	35.769.152.000	35.769.152.000	1.400.000.000	1.400.000.000	19.273.739.000	19.273.739.000	379.478.589.000	379.478.589.000
122	Provinsi Bengkulu	946.363.065.000	946.363.065.000	29.199.114.000	29.199.114.000	157.621.757.000	157.621.757.000	44.985.488.000	44.985.488.000	-	-	89.472.453.000	89.472.453.000	1.267.641.877.000	1.267.641.877.000
123	Kab. Bengkulu Selatan	343.324.405.000	343.324.405.000	18.390.396.000	18.390.396.000	65.099.631.000	65.099.631.000	37.932.089.000	37.932.089.000	3.200.000.000	3.200.000.000	68.741.823.000	68.741.823.000	536.688.344.000	536.688.344.000
124	Kab. Bengkulu Utara	409.291.628.000	409.291.628.000	37.939.518.000	37.939.518.000	85.351.104.000	85.351.104.000	50.287.723.000	50.287.723.000	1.000.000.000	1.000.000.000	22.448.833.000	22.448.833.000	606.318.806.000	606.318.806.000
125	Kab. Rejang Lebong	391.330.538.000	391.330.538.000	25.694.394.000	25.694.394.000	82.486.843.000	82.486.843.000	45.382.847.000	45.382.847.000	6.800.000.000	6.800.000.000	26.298.270.000	26.298.270.000	577.992.892.000	577.992.892.000
126	Kota Bengkulu	490.445.846.000	490.445.846.000	81.300.858.000	81.300.858.000	23.181.969.000	23.181.969.000	44.779.706.000	44.779.706.000	13.400.000.000	13.400.000.000	9.487.799.000	9.487.799.000	662.596.178.000	662.596.178.000
127	Kab. Kaur	287.145.362.000	287.145.362.000	18.118.638.000	18.118.638.000	49.050.143.000	49.050.143.000	36.433.295.000	36.433.295.000	600.000.000	-	32.438.926.000	32.438.926.000	423.786.364.000	423.186.364.000
128	Kab. Seluma	318.998.729.000	318.998.729.000	34.619.484.000	34.619.484.000	58.458.244.000	58.458.244.000	40.583.654.000	40.583.654.000	4.000.000.000	4.000.000.000	33.054.651.000	33.054.651.000	489.714.762.000	489.714.762.000
129	Kab. Mukomuko	342.235.186.000	342.235.186.000	18.027.036.000	18.027.036.000	46.138.238.000	46.138.238.000	40.569.081.000	40.569.081.000	600.000.000	600.000.000	25.165.180.000	25.165.180.000	472.734.721.000	472.734.721.000
130	Kab. Lebong	243.409.253.000	243.409.253.000	20.842.488.000	20.842.488.000	43.248.645.000	43.248.645.000	38.562.621.000	38.562.621.000	2.200.000.000	2.200.000.000	39.179.860.000	39.179.860.000	387.442.867.000	387.442.867.000
131	Kab. Kepahiang	274.777.945.000	274.777.945.000	26.660.052.000	26.660.052.000	47.179.285.000	47.179.285.000	34.493.649.000	34.493.649.000	2.400.000.000	2.400.000.000	27.506.220.000	27.506.220.000	413.017.151.000	413.017.151.000
132	Kab. Bengkulu Tengah	305.648.049.000	305.648.049.000	7.918.044.000	7.918.044.000	45.383.619.000	45.383.619.000	33.158.602.000	33.158.602.000	200.000.000	200.000.000	26.346.492.000	26.346.492.000	418.654.806.000	418.654.806.000
133	Provinsi Lampung	1.305.238.984.000	1.305.238.984.000	109.279.728.000	109.279.728.000	297.737.896.000	297.737.896.000	58.848.701.000	58.848.701.000	-	-	29.997.988.000	29.997.988.000	1.801.103.297.000	1.801.103.297.000
134	Kab. Lampung Barat	380.756.142.000	380.756.142.000	6.989.766.000	6.989.766.000	56.968.257.000	56.968.257.000	44.853.018.000	44.853.018.000	1.000.000.000	1.000.000.000	24.075.932.000	24.075.932.000	514.643.115.000	514.643.115.000
135	Kab. Lampung Selatan	732.731.103.000	732.731.103.000	53.863.968.000	53.863.968.000	132.247.724.000	132.247.724.000	84.947.840.000	84.947.840.000	800.000.000	800.000.000	18.919.445.000	18.919.445.000	1.023.510.080.000	1.023.510.080.000
136	Kab. Lampung Tengah	947.013.565.000	947.013.565.000	90.204.912.000	90.204.912.000	168.495.508.000	168.495.508.000	102.590.465.000	102.590.465.000	2.000.000.000	2.000.000.000	25.667.756.000	25.667.756.000	1.335.972.206.000	1.335.972.206.000
137	Kab. Lampung Utara	668.431.263.000	668.431.263.000	12.630.660.000	12.630.660.000	103.843.354.000	103.843.354.000	69.475.386.000	69.475.386.000	3.000.000.000	3.000.000.000	56.389.132.000	56.389.132.000	913.769.795.000	913.769.795.000
138	Kab. Lampung Timur	869.059.953.000	869.059.953.000	30.154.374.000	30.154.374.000	73.997.284.000	73.997.284.000	72.878.897.000	72.878.897.000	-	-	31.184.220.000	31.184.220.000	1.077.274.728.000	1.077.274.728.000
139	Kab. Tanggamus	534.571.366.000	534.571.366.000	34.543.536.000	34.543.536.000	86.386.151.000	86.386.151.000	62.533.451.000	62.533.451.000	600.000.000	300.000.000	31.815.632.000	31.815.632.000	750.450.136.000	750.150.136.000
140	Kab. Tulang Bawang	440.425.486.000	440.425.486.000	10.062.072.000	10.062.072.000	82.450.395.000	82.450.395.000	42.167.082.000	42.167.082.000	800.000.000	800.000.000	25.344.526.000	25.344.526.000	601.249.561.000	601.249.561.000
141	Kab. Way Kanan	460.079.145.000	460.079.145.000	8.151.552.000	8.151.552.000	77.200.253.000	77.200.253.000	46.383.065.000	46.383.065.000	1.200.000.000	1.200.000.000	53.102.446.000	53.102.446.000	646.116.461.000	646.116.461.000
142	Kota Bandar Lampung	864.642.934.000	864.642.934.000	35.342.580.000	35.342.580.000	65.485.919.000	65.485.919.000	67.879.905.000	67.879.905.000	25.200.000.000	25.200.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	1.065.851.338.000	1.065.851.338.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAU Block Grant		DAU Specific Grant										Pagu	Realisasi
				Formasi PPPK		Bidang Pendidikan		Bidang Kesehatan		Kelurahan		Bidang Pekerjaan Umum			
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	)=(5)+(7)+(9)+(11)+(13)+(	(18)=(6)+(8)+(10)+(12)+(14)+(16)
143	Kota Metro	391.946.467.000	391.946.467.000	8.010.972.000	8.010.972.000	11.218.239.000	11.218.239.000	23.127.036.000	23.127.036.000	4.400.000.000	4.400.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	446.002.714.000	446.002.714.000
144	Kab. Pesawaran	458.839.535.000	458.839.535.000	29.035.680.000	29.035.680.000	76.966.985.000	76.966.985.000	52.639.657.000	52.639.657.000	-	-	17.194.438.000	17.194.438.000	634.676.295.000	634.676.295.000
145	Kab. Pringsewu	432.327.822.000	432.327.822.000	20.673.018.000	20.673.018.000	73.249.054.000	73.249.054.000	41.157.436.000	41.157.436.000	1.000.000.000	1.000.000.000	22.769.171.000	22.769.171.000	591.176.501.000	591.176.501.000
146	Kab. Mesuji	282.570.566.000	282.570.566.000	24.343.620.000	24.343.620.000	57.400.546.000	57.400.546.000	35.049.869.000	35.049.869.000	-	-	19.577.305.000	19.577.305.000	418.941.906.000	418.941.906.000
147	Kab. Tulang Bawang Barat	315.722.177.000	315.722.177.000	10.030.230.000	10.030.230.000	56.573.635.000	56.573.635.000	28.365.293.000	28.365.293.000	600.000.000	600.000.000	49.519.170.000	49.519.170.000	460.810.505.000	460.810.505.000
148	Kab. Pesisir Barat	262.538.609.000	262.538.609.000	32.841.726.000	32.841.726.000	52.522.242.000	52.522.242.000	42.211.123.000	42.211.123.000	400.000.000	400.000.000	29.216.838.000	29.216.838.000	419.730.538.000	419.730.538.000
149	Provinsi DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	22.179.718.000	22.179.718.000	-	-	22.179.718.000	22.179.718.000
150	Provinsi Jawa Barat	2.622.418.331.000	2.622.418.331.000	285.991.722.000	285.991.722.000	328.904.360.000	328.904.360.000	45.148.795.000	45.148.795.000	-	-	16.505.000.000	16.505.000.000	3.298.968.208.000	3.298.968.208.000
151	Kab. Bandung	1.470.459.629.000	1.470.459.629.000	262.663.290.000	262.663.290.000	270.156.401.000	270.156.401.000	96.086.564.000	96.086.564.000	2.000.000.000	2.000.000.000	19.147.807.000	19.147.807.000	2.120.513.691.000	2.120.513.691.000
152	Kab. Bekasi	835.704.268.000	835.704.268.000	148.243.074.000	148.243.074.000	161.107.331.000	161.107.331.000	53.080.668.000	53.080.668.000	1.400.000.000	1.400.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	1.206.835.341.000	1.206.835.341.000
153	Kab. Bogor	1.314.412.628.000	1.314.412.628.000	325.508.526.000	325.508.526.000	233.683.569.000	233.683.569.000	151.310.180.000	151.310.180.000	3.800.000.000	3.800.000.000	23.698.967.000	23.698.967.000	2.052.413.870.000	2.052.413.870.000
154	Kab. Ciamis	833.530.967.000	833.530.967.000	98.252.964.000	98.252.964.000	115.659.701.000	115.659.701.000	74.720.213.000	74.720.213.000	1.400.000.000	1.400.000.000	30.959.195.000	30.959.195.000	1.154.523.040.000	1.154.523.040.000
155	Kab. Cianjur	977.818.212.000	977.818.212.000	173.964.984.000	173.964.984.000	296.431.957.000	296.431.957.000	130.558.328.000	130.558.328.000	1.200.000.000	1.200.000.000	40.842.314.000	40.842.314.000	1.620.815.795.000	1.620.815.795.000
156	Kab. Cirebon	1.066.876.005.000	1.066.876.005.000	107.958.954.000	107.958.954.000	207.004.517.000	207.004.517.000	93.809.524.000	93.809.524.000	2.400.000.000	2.400.000.000	16.778.372.000	16.778.372.000	1.494.827.372.000	1.494.827.372.000
157	Kab. Garut	1.059.401.127.000	1.059.401.127.000	333.443.472.000	333.443.472.000	247.737.314.000	247.737.314.000	126.661.454.000	126.661.454.000	4.200.000.000	4.200.000.000	25.276.596.000	25.276.596.000	1.796.719.963.000	1.796.719.963.000
158	Kab. Indramayu	936.645.433.000	936.645.433.000	93.691.470.000	93.691.470.000	220.227.616.000	220.188.632.254	93.005.222.000	93.005.222.000	1.600.000.000	1.600.000.000	7.905.062.000	7.905.062.000	1.353.074.803.000	1.353.035.819.254
159	Kab. Karawang	816.199.193.000	816.199.193.000	212.305.512.000	212.305.512.000	165.243.490.000	165.243.490.000	78.411.109.000	78.411.109.000	2.400.000.000	2.400.000.000	24.334.626.000	24.334.626.000	1.298.893.930.000	1.298.893.930.000
160	Kab. Kuningan	856.244.644.000	856.244.644.000	66.812.880.000	66.812.880.000	153.677.275.000	153.677.275.000	49.712.229.000	49.712.229.000	3.000.000.000	3.000.000.000	21.594.002.000	21.594.002.000	1.151.041.030.000	1.151.041.030.000
161	Kab. Majalengka	871.984.197.000	871.984.197.000	63.730.854.000	63.730.854.000	122.786.244.000	122.786.244.000	90.769.696.000	90.769.696.000	2.600.000.000	2.600.000.000	17.718.223.000	17.718.223.000	1.169.589.214.000	1.169.589.214.000
162	Kab. Purwakarta	574.666.837.000	574.666.837.000	59.886.156.000	59.886.156.000	117.913.789.000	117.913.789.000	60.855.654.000	60.855.654.000	1.800.000.000	1.800.000.000	15.138.622.000	15.138.622.000	830.261.058.000	830.261.058.000
163	Kab. Subang	923.437.779.000	923.437.779.000	79.154.700.000	79.154.700.000	163.335.091.000	163.335.091.000	72.745.240.000	72.745.240.000	1.600.000.000	1.600.000.000	19.578.029.000	19.578.029.000	1.259.850.839.000	1.259.850.839.000
164	Kab. Sukabumi	1.110.707.718.000	1.110.707.718.000	152.063.418.000	152.063.418.000	195.230.213.000	195.230.213.000	122.742.113.000	122.742.113.000	1.000.000.000	1.000.000.000	36.003.085.000	36.003.085.000	1.617.746.547.000	1.617.746.547.000
165	Kab. Sumedang	826.124.124.000	826.124.124.000	78.983.844.000	78.983.844.000	116.374.087.000	116.374.087.000	61.611.456.000	61.611.456.000	1.400.000.000	1.400.000.000	11.473.429.000	11.473.429.000	1.095.966.940.000	1.095.966.940.000
166	Kab. Tasikmalaya	1.041.765.887.000	1.041.765.887.000	95.233.674.000	95.233.674.000	149.953.206.000	149.953.206.000	130.986.427.000	130.986.427.000	-	-	47.851.581.000	47.851.581.000	1.465.790.775.000	1.465.790.775.000
167	Kota Bandung	1.342.735.831.000	1.342.735.831.000	93.816.684.000	93.816.684.000	103.005.348.000	103.005.348.000	61.074.801.000	61.074.801.000	30.200.000.000	30.200.000.000	17.581.889.000	13.186.416.000	1.648.414.553.000	1.644.019.080.000
168	Kota Bekasi	975.209.496.000	975.209.496.000	135.868.188.000	135.868.188.000	62.464.165.000	62.464.165.000	37.515.071.000	37.515.071.000	11.200.000.000	11.200.000.000	-	-	1.222.256.920.000	1.222.256.920.000
169	Kota Bogor	606.779.086.000	606.779.086.000	54.609.792.000	54.609.792.000	71.277.431.000	71.277.431.000	34.400.783.000	34.400.783.000	13.600.000.000	13.600.000.000	12.410.505.000	12.410.505.000	793.077.597.000	793.077.597.000
170	Kota Cirebon	388.577.574.000	388.577.574.000	23.748.522.000	23.748.522.000	104.671.763.000	104.671.763.000	30.535.099.000	30.535.099.000	4.400.000.000	4.400.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	559.232.958.000	559.232.958.000
171	Kota Depok	728.115.563.000	728.115.563.000	81.231.672.000	81.231.672.000	72.087.286.000	72.087.286.000	31.286.437.000	31.286.437.000	12.600.000.000	12.598.461.639	-	-	925.320.958.000	925.319.419.639
172	Kota Sukabumi	389.503.048.000	389.503.048.000	20.037.666.000	20.037.666.000	38.287.664.000	38.287.664.000	27.009.866.000	27.009.866.000	6.600.000.000	6.600.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	488.738.244.000	488.738.244.000
173	Kota Tasikmalaya	580.783.768.000	580.783.768.000	40.832.460.000	40.832.460.000	78.262.383.000	78.262.383.000	46.410.302.000	46.410.302.000	13.800.000.000	13.800.000.000	16.937.562.000	16.937.562.000	777.026.475.000	777.026.475.000
174	Kota Cimahi	465.469.124.000	465.469.124.000	27.481.974.000	27.481.974.000	27.096.034.000	27.096.034.000	22.708.904.000	22.708.904.000	3.000.000.000	3.000.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	553.056.036.000	553.056.036.000
175	Kota Banjar	285.495.634.000	285.495.634.000	25.521.894.000	25.521.894.000	24.479.159.000	24.479.159.000	25.728.697.000	25.728.697.000	1.800.000.000	1.800.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	370.325.384.000	370.325.384.000
176	Kab. Bandung Barat	791.524.037.000	791.524.037.000	45.639.552.000	45.639.552.000	185.274.530.000	185.274.530.000	67.043.552.000	67.043.552.000	-	-	11.433.957.000	11.433.957.000	1.100.915.628.000	1.100.915.628.000
177	Kab. Pangandaran	397.550.157.000	397.550.157.000	29.362.494.000	29.362.494.000	46.307.158.000	46.307.158.000	35.307.720.000	35.307.720.000	-	-	18.978.005.000	18.978.005.000	527.505.534.000	527.505.534.000
178	Provinsi Jawa Tengah	2.964.745.958.000	2.964.745.958.000	278.649.018.000	278.649.018.000	315.034.367.000	315.034.367.000	-	-	-	-	-	-	3.558.429.343.000	3.558.429.343.000
179	Kab. Banjarnegara	699.305.314.000	699.305.314.000	55.689.402.000	55.689.402.000	110.234.098.000	110.234.098.000	35.100.007.000	35.100.007.000	2.400.000.000	2.400.000.000	37.535.390.000	37.535.390.000	940.264.211.000	940.264.211.000
180	Kab. Banyumas	996.161.109.000	996.161.109.000	133.443.000.000	133.443.000.000	120.324.169.000	120.324.169.000	57.067.421.000	57.067.421.000	6.000.000.000	6.000.000.000	39.882.524.000	39.882.524.000	1.352.878.223.000	1.352.878.223.000
181	Kab. Batang	578.766.476.000	578.766.476.000	56.997.210.000	56.997.210.000	92.371.738.000	92.371.738.000	25.865.591.000	25.865.591.000	1.800.000.000	1.800.000.000	16.743.068.000	16.743.068.000	772.544.083.000	772.544.083.000
182	Kab. Blora	640.570.353.000	640.570.353.000	96.850.728.000	96.850.728.000	97.448.745.000	97.448.745.000	30.799.016.000	30.799.016.000	4.800.000.000	4.800.000.000	35.959.356.000	35.959.356.000	906.428.198.000	906.428.198.000
183	Kab. Boyolali	820.503.796.000	820.503.796.000	40.103.010.000	40.103.010.000	97.567.564.000	97.567.564.000	19.717.346.000	19.717.346.000	1.200.000.000	1.200.000.000	12.343.819.000	12.343.819.000	991.435.535.000	991.435.535.000
184	Kab. Brebes	933.640.614.000	933.640.614.000	84.518.148.000	84.518.148.000	170.176.123.000	170.176.123.000	128.983.201.000	128.983.201.000	1.000.000.000	1.000.000.000	13.505.176.000	13.505.176.000	1.331.823.262.000	1.331.823.262.000
185	Kab. Cilacap	1.040.602.308.000	1.040.602.308.000	71.332.680.000	71.332.680.000	140.871.318.000	140.871.318.000	60.583.654.000	60.583.654.000	3.000.000.000	3.000.000.000	24.644.685.000	24.644.685.000	1.341.034.645.000	1.341.034.645.000
186	Kab. Demak	723.264.495.000	723.264.495.000	45.306.252.000	45.306.252.000	89.375.669.000	71.752.243.203	23.684.338.000	23.684.338.000	1.200.000.000	1.200.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	890.130.754.000	872.507.328.203
187	Kab. Grobogan	773.940.455.000	773.940.455.000	119.420.256.000	119.420.256.000	132.857.647.000	132.857.647.000	35.502.766.000	35.502.766.000	1.400.000.000	1.400.000.000	20.228.364.000	20.228.364.000	1.083.349.488.000	1.083.349.488.000
188	Kab. Jepara	801.850.945.000	801.850.945.000	34.829.004.000	34.829.004.000	79.694.728.000	79.694.728.000	21.582.460.000	21.582.460.000	2.200.000.000	2.200.000.000	24.442.710.000	24.442.710.000	964.599.847.000	964.599.847.000
189	Kab. Karanganyar	814.646.924.000	814.646.924.000	44.270.130.000	44.270.130.000	60.696.844.000	60.696.844.000	-	-	3.000.000.000	3.000.000.000	12.643.180.000	12.643.180.000	935.257.078.000	935.257.078.000
190	Kab. Kebumen	1.008.784.641.000	1.008.784.641.000	50.868.048.000	50.868.048.000	100.248.901.000	100.248.901.000	56.839.975.000	56.839.975.000	2.200.000.000	2.200.000.000	21.158.653.000	21.158.653.000	1.240.100.218.000	1.240.100.218.000
191	Kab. Kendal	713.875.839.000	713.875.839.000	63.355.338.000	63.355.338.000	119.137.411.000	119.137.411.000	33.359.875.000	33.359.875.000	4.000.000.000	4.000.000.000	13.055.997.000	13.055.997.000	946.784.460.000	946.784.460.000
192	Kab. Klaten	1.041.138.536.000	1.041.138.536.000	61.236.420.000	61.236.420.000	96.468.696.000	96.468.696.000	-	-	2.000.000.000	2.000.000.000	8.642.101.000	8.642.101.000	1.209.485.753.000	1.209.485.753.000
193	Kab. Kudus	690.288.359.000	690.288.359.000	38.484.366.000	38.484.366.000	46.162.831.000	46.162.831.000	-	-	1.800.000.000	1.800.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	784.035.556.000	784.035.556.000
194	Kab. Magelang	791.774.261.000	791.774.261.000	57.800.622.000	57.800.622.000	101.710.758.000	101.710.758.000	45.810.553.000	45.810.553.000	1.000.000.000	1.000.000.000	24.610.224.000	24.610.224.000	1.022.706.418.000	1.022.706.418.000
195	Kab. Pati	998.163.353.000	998.163.353.000	56.702.160.000	56.702.160.000	72.525.864.000	72.525.864.000	17.462.945.000	17.462.945.000	1.000.000.000	1.000.000.000	15.979.868.000	15.979.868.000	1.161.834.190.000	1.161.834.190.000
196	Kab. Pekalongan	693.494.983.000	693.494.983.000	37.350.810.000	37.350.810.000	121.089.473.000	121.089.473.000	40.822.222.000	40.822.222.000	2.600.000.000	2.600.000.000	17.933.630.000	17.933.630.000	913.291.118.000	913.291.118.000
197	Kab. Pemalang	879.540.440.000	879.540.440.000	55.272.558.000	55.272.558.000	169.093.638.000	169.093.638.000	56.027.811.000	56.027.811.000	2.200.000.000	2.200.000.000	16.248.261.000	16.248.261.000	1.178.382.708.000	1.178.382.708.000
198	Kab. Purbalingga	697.053.093.000	697.053.093.000	29.029.074.000	29.029.074.000	85.812.916.000	85.812.916.000	42.446.418.000	42.446.418.000	3.000.000.000	3.000.000.000	16.748.680.000	16.748.680.000	874.090.181.000	874.090.181.000
199	Kab. Purworejo	713.208.886.000	713.208.886.000	66.170.904.000	66.170.904.000	118.530.746.000	118.530.746.000	28.432.195.000	28.432.195.000	5.000.000.000	5.000.000.000	26.594.972.000	26.594.972.000	957.937.703.000	957.937.703.000
200	Kab. Rembang	567.320.013.000	567.320.013.000	80.044.242.000	80.044.242.000	60.603.440.000	60.603.440.000	24.109.948.000	24.109.948.000	1.400.000.000	1.400.000.000	15.026.523.000	15.026.523.000	748.504.166.000	748.504.166.000
201	Kab. Semarang	686.881.608.000	686.881.608.000	111.680.952.000	111.680.952.000	108.377.426.000	108.377.426.000	20.535.495.000	20.535.495.000	5.400.000.000	5.400.000.000	8.602.325.000	8.602.325.000	941.477.806.000	941.477.806.000
202	Kab. Sragen	849.703.945.000	849.703.945.000	48.051.768.000	48.051.768.000	90.918.495.000	90.918.495.000	22.090.283.000	22.090.283.000	2.400.000.000	2.400.000.000	18.546.286.000	18.546.286.000	1.031.710.777.000	1.031.710.777.000
203	Kab. Sukoharjo	755.859.800.000	755.859.800.000	58.003.614.000	58.003.614.000	65.278.502.000	65.278.502.000	-	-	3.400.000.000	3.400.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	889.841.916.000	889.841.916.000
204	Kab. Tegal	789.549.942.000	789.549.942.000	104.246.838.000	104.246.838.000	161.906.871.000	161.906.871.000	76.388.922.000	76.388.922.000	1.200.000.000	1.200.000.000	13.130.532.000	13.130.532.000	1.146.423.105.000	1.146.423.105.000
205	Kab. Temanggung	606.355.134.000	606.355.134.000	36.910.242.000	36.910.242.000	104.909.673.000	104.909.673.000	17.202.808.000	17.202.808.000	4.600.000.000	4.600.000.000	21.540.862.000	21.540.862.000	791.518.719.000	791.518.719.000
206	Kab. Wonogiri	932.200.322.000	932.200.322.000	66.316.956.000	66.316.956.000	67.219.462.000	67.219.462.000	19.034.875.000	19.034.875.000	8.600.000.000	8.600.000.000	21.499.165.000	21.499.165.000	1.114.870.780.000	1.114.870.780.000
207	Kab. Wonosobo	558.744.272.000	558.744.272.000	55.131.330.000	55.131.330.000	119.809.743.000	119.809.743.000	51.587.621.000	51.587.621.000	5.800.000.000	5.800.000.000	41.153.993.000	41.153.993.000	832.226.959.000	832.226.959.000
208	Kota Magelang	379.905.535.000	379.905.535.000	15.103.884.000	15.103.884.000	24.993.078.000	24.993.078.000	-	-	3.400.000.000	3.400.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	430.702.497.000	430.702.497.000
209	Kota Pekalongan	371.352.004.000	371.352.004.000	9.772.242.000	9.772.242.000	39.645.234.000	39.645.234.000	17.730.584.000	17.730.584.000	5.400.000.000	5.400.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	451.200.064.000	451.200.064.000
210	Kota Salatiga	389.689.879.000	389.689.879.000	11.563.350.000	11.563.350.000	27.693.758.000	27.693.758.000	-	-	4.600.000.000	4.600.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	440.846.987.000	440.846.987.000
211	Kota Semarang	1.095.367.636.000	1.095.367.636.000	70.422.138.000	70.422.138.000	-	-	-	-	35.400.000.000	35.400.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	1.208.489.774.000	1.208.489.774.000
212	Kota Surakarta	689.737.973.000	689.737.973.000	33.401.154.000	33.401.154.000	67.949.901.000	67.949.901.000	-	-	10.800.000.000	10.800.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	809.189.028.000	809.189.028.000
213	Kota Tegal	333.772.861.000	333.772.861.000	38.572.278.000	38.572.278.000	72.757.013.000	72.757.013.000	15.517.944.000	15.517.944.000	5.400.000.000	5.400.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	473.320.096.000	473.320.096.000
214	Provinsi DI Yogyakarta	1.206.102.520.000	1.206.102.520.000	45.114.804.000	45.114.804.000	-	-	-	-	-	-	16.505.000.000	16.505.000.000	1.267.722.324.000	1.267.722.324.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAU Block Grant		DAU Specific Grant										Pagu	Realisasi
				Formasi PPPK		Bidang Pendidikan		Bidang Kesehatan		Kelurahan		Bidang Pekerjaan Umum			
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	)=(5)+(7)+(9)+(11)+(13)+(	(18)=(6)+(8)+(10)+(12)+(14)+(16)
215	Kab. Bantul	813.219.746.000	813.219.746.000	36.854.988.000	36.854.988.000	56.076.924.000	56.076.924.000	37.833.236.000	37.833.236.000	-	-	10.706.304.000	10.706.304.000	954.691.198.000	954.691.198.000
216	Kab. Gunung Kidul	734.246.412.000	734.246.412.000	27.874.452.000	27.874.452.000	76.992.403.000	76.992.403.000	34.082.490.000	34.082.490.000	-	-	39.790.237.000	39.790.237.000	912.985.994.000	912.985.994.000
217	Kab. Kulon Progo	577.426.423.000	577.426.423.000	27.453.780.000	27.453.780.000	31.535.720.000	31.535.720.000	16.661.604.000	16.661.604.000	200.000.000	200.000.000	23.913.465.000	23.913.465.000	677.190.992.000	677.190.992.000
218	Kab. Sleman	819.538.664.000	819.538.664.000	40.138.404.000	40.138.404.000	74.749.870.000	74.749.870.000	29.716.106.000	29.716.106.000	-	-	7.701.971.000	7.701.971.000	971.845.015.000	971.845.015.000
219	Kota Yogyakarta	549.695.506.000	549.695.506.000	15.545.664.000	15.545.664.000	39.736.935.000	39.736.935.000	19.998.940.000	19.998.940.000	9.000.000.000	9.000.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	641.277.045.000	641.277.045.000
220	Provinsi Jawa Timur	3.263.464.775.000	3.263.464.775.000	249.985.752.000	249.985.752.000	278.880.614.000	278.880.614.000	94.082.621.000	94.082.621.000	-	-	16.505.000.000	16.505.000.000	3.902.918.762.000	3.902.918.762.000
221	Kab. Bangkalan	630.459.199.000	630.459.199.000	74.569.770.000	74.569.770.000	160.629.911.000	160.629.911.000	82.184.351.000	82.184.351.000	1.600.000.000	1.600.000.000	28.776.307.000	28.776.307.000	978.219.538.000	978.219.538.000
222	Kab. Banyuwangi	1.031.744.145.000	1.031.744.145.000	56.080.950.000	56.080.950.000	110.337.779.000	110.337.779.000	99.906.945.000	99.906.945.000	5.600.000.000	5.600.000.000	68.497.260.000	68.497.260.000	1.372.167.079.000	1.372.167.079.000
223	Kab. Blitar	904.962.945.000	904.962.945.000	51.917.208.000	51.917.208.000	50.599.174.000	50.599.174.000	49.255.557.000	49.255.557.000	5.600.000.000	5.600.000.000	32.703.580.000	32.703.580.000	1.095.038.464.000	1.095.038.464.000
224	Kab. Bojonegoro	519.649.507.000	519.649.507.000	229.347.108.000	229.347.108.000	84.945.602.000	84.945.602.000	65.195.076.000	65.195.076.000	2.200.000.000	2.200.000.000	13.690.430.000	13.690.430.000	915.027.723.000	915.027.723.000
225	Kab. Bondowoso	565.641.775.000	565.641.775.000	60.580.656.000	60.580.656.000	87.905.652.000	87.905.652.000	91.850.895.000	91.850.895.000	2.000.000.000	2.000.000.000	74.055.723.000	74.055.723.000	882.034.701.000	882.034.701.000
226	Kab. Gresik	742.301.624.000	742.301.624.000	51.619.956.000	51.619.956.000	54.223.761.000	54.223.761.000	54.607.692.000	54.607.692.000	5.200.000.000	5.200.000.000	7.651.361.000	7.651.361.000	915.604.394.000	915.604.394.000
227	Kab. Jember	1.275.481.841.000	1.275.481.841.000	60.988.410.000	60.988.410.000	146.382.981.000	146.382.981.000	159.680.946.000	159.680.946.000	4.400.000.000	4.400.000.000	58.723.602.000	58.723.602.000	1.705.657.780.000	1.705.657.780.000
228	Kab. Jombang	853.365.709.000	853.365.709.000	62.376.762.000	62.376.762.000	61.127.010.000	61.127.010.000	67.398.638.000	67.398.638.000	800.000.000	800.000.000	8.878.167.000	8.878.167.000	1.053.946.286.000	1.053.946.286.000
229	Kab. Kediri	943.139.105.000	943.139.105.000	92.592.996.000	92.592.996.000	88.552.380.000	88.552.380.000	66.082.809.000	66.082.809.000	200.000.000	200.000.000	17.267.480.000	17.267.480.000	1.207.834.770.000	1.207.834.770.000
230	Kab. Lamongan	878.418.313.000	878.418.313.000	113.869.176.000	113.869.176.000	58.601.084.000	58.601.084.000	78.691.039.000	78.691.039.000	2.400.000.000	2.400.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	1.139.279.612.000	1.139.279.612.000
231	Kab. Lumajang	666.251.987.000	666.251.987.000	69.504.546.000	69.504.546.000	100.299.269.000	100.299.018.690	80.829.753.000	80.829.752.874	1.400.000.000	1.400.000.000	22.784.784.000	22.784.784.000	941.070.339.000	941.070.088.564
232	Kab. Madiun	691.403.353.000	691.403.353.000	36.083.598.000	36.083.598.000	30.742.898.000	30.742.898.000	60.777.924.000	60.777.924.000	1.600.000.000	1.600.000.000	15.804.244.000	15.804.244.000	836.412.017.000	836.412.017.000
233	Kab. Magetan	720.112.852.000	720.112.852.000	50.342.052.000	50.342.052.000	34.125.444.000	34.125.444.000	50.137.430.000	50.137.430.000	5.600.000.000	5.600.000.000	18.062.421.000	18.062.421.000	878.380.199.000	878.380.199.000
234	Kab. Malang	1.255.310.668.000	1.255.310.668.000	165.186.606.000	165.186.606.000	118.359.829.000	118.359.829.000	96.163.505.000	96.163.505.000	2.400.000.000	2.400.000.000	28.851.698.000	28.851.698.000	1.666.272.306.000	1.666.272.306.000
235	Kab. Mojokerto	775.235.631.000	775.235.631.000	39.455.514.000	39.455.514.000	61.732.966.000	61.732.966.000	53.986.354.000	53.986.354.000	1.000.000.000	1.000.000.000	16.118.622.000	16.118.622.000	947.529.087.000	947.529.087.000
236	Kab. Nganjuk	801.866.384.000	801.866.384.000	75.254.820.000	75.254.820.000	61.186.319.000	61.186.319.000	67.652.897.000	67.652.897.000	4.000.000.000	4.000.000.000	22.850.179.000	22.850.179.000	1.032.810.599.000	1.032.810.599.000
237	Kab. Ngawi	784.795.586.000	784.795.586.000	82.345.116.000	82.345.116.000	61.383.796.000	61.383.796.000	61.807.487.000	61.807.487.000	800.000.000	800.000.000	21.107.768.000	21.107.768.000	1.012.239.753.000	1.012.239.753.000
238	Kab. Pacitan	601.111.133.000	601.111.133.000	27.661.854.000	27.661.854.000	44.275.696.000	44.275.696.000	47.461.102.000	47.461.102.000	1.000.000.000	1.000.000.000	46.822.411.000	46.822.411.000	768.332.196.000	768.332.196.000
239	Kab. Pamekasan	574.331.856.000	574.331.856.000	39.485.358.000	39.485.358.000	105.777.692.000	105.777.692.000	90.875.246.000	90.875.246.000	2.200.000.000	2.200.000.000	17.064.272.000	17.064.272.000	829.734.424.000	829.734.424.000
240	Kab. Pasuruan	860.001.539.000	860.001.539.000	52.584.402.000	52.584.402.000	119.186.285.000	119.186.285.000	94.908.536.000	94.908.536.000	4.800.000.000	4.800.000.000	28.311.529.000	28.311.529.000	1.159.792.291.000	1.159.792.291.000
241	Kab. Ponorogo	820.664.645.000	820.664.645.000	45.175.434.000	45.175.434.000	73.919.490.000	73.919.490.000	56.487.690.000	56.487.690.000	5.200.000.000	5.200.000.000	27.576.731.000	27.576.731.000	1.029.023.990.000	1.029.023.990.000
242	Kab. Probolinggo	640.191.002.000	640.191.002.000	58.924.656.000	58.924.656.000	136.592.925.000	136.592.925.000	107.840.789.000	107.840.789.000	1.000.000.000	1.000.000.000	25.653.779.000	25.653.779.000	970.203.151.000	970.203.151.000
243	Kab. Sampang	532.418.417.000	532.418.417.000	40.327.470.000	40.327.470.000	142.853.214.000	142.853.214.000	85.925.016.000	85.925.016.000	1.200.000.000	1.200.000.000	17.567.920.000	17.567.920.000	820.292.037.000	820.292.037.000
244	Kab. Sidoarjo	995.980.659.000	995.980.659.000	140.218.134.000	140.218.134.000	-	-	46.972.461.000	46.972.461.000	6.200.000.000	5.600.000.000	-	-	1.189.371.254.000	1.188.771.254.000
245	Kab. Situbondo	554.433.359.000	554.433.359.000	42.331.554.000	42.331.554.000	73.780.106.000	73.780.106.000	68.804.041.000	68.804.041.000	800.000.000	800.000.000	41.347.378.000	41.347.378.000	781.496.438.000	781.496.438.000
246	Kab. Sumenep	860.874.807.000	860.874.807.000	23.429.982.000	23.429.982.000	91.416.271.000	91.416.271.000	88.281.152.000	88.281.152.000	800.000.000	800.000.000	66.245.258.000	66.245.258.000	1.131.047.470.000	1.131.047.470.000
247	Kab. Trenggalek	658.088.127.000	658.088.127.000	86.680.608.000	86.680.608.000	46.654.871.000	46.654.871.000	35.671.388.000	35.671.388.000	1.000.000.000	1.000.000.000	34.624.239.000	34.624.239.000	862.719.233.000	862.719.233.000
248	Kab. Tuban	771.569.754.000	771.569.754.000	57.394.074.000	57.394.074.000	87.248.237.000	87.248.237.000	75.908.055.000	75.908.055.000	3.400.000.000	3.400.000.000	11.895.609.000	11.895.609.000	1.007.415.729.000	1.007.415.729.000
249	Kab. Tulungagung	876.976.757.000	876.976.757.000	86.235.018.000	86.235.018.000	73.192.261.000	73.192.261.000	41.418.818.000	41.418.818.000	2.800.000.000	2.800.000.000	34.715.454.000	34.715.454.000	1.115.338.308.000	1.115.338.308.000
250	Kota Blitar	361.178.529.000	361.178.529.000	13.014.810.000	13.014.810.000	16.583.781.000	16.583.781.000	14.565.191.000	14.565.191.000	4.200.000.000	4.200.000.000	7.914.202.000	7.914.202.000	417.456.513.000	417.456.513.000
251	Kota Kediri	508.122.198.000	508.122.198.000	22.646.886.000	22.646.886.000	28.195.694.000	28.195.694.000	20.341.475.000	20.341.475.000	9.200.000.000	9.200.000.000	8.062.442.000	8.062.442.000	596.568.695.000	596.568.695.000
252	Kota Madiun	425.704.167.000	425.704.167.000	22.232.784.000	22.232.784.000	12.405.875.000	12.405.875.000	21.545.448.000	21.545.448.000	5.400.000.000	5.400.000.000	-	-	487.288.274.000	487.288.274.000
253	Kota Malang	728.339.369.000	728.339.369.000	18.159.804.000	18.159.804.000	33.224.923.000	33.224.923.000	35.640.827.000	35.640.827.000	11.400.000.000	11.400.000.000	-	-	826.764.923.000	826.764.923.000
254	Kota Mojokerto	351.560.603.000	351.560.603.000	11.436.696.000	11.436.696.000	-	-	16.571.178.000	16.571.178.000	3.600.000.000	3.600.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	390.468.477.000	390.468.477.000
255	Kota Pasuruan	324.434.195.000	324.434.195.000	18.023.628.000	18.023.628.000	43.759.556.000	43.759.556.000	26.984.969.000	26.984.969.000	6.800.000.000	6.800.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	427.302.348.000	427.302.348.000
256	Kota Probolinggo	375.985.035.000	375.985.035.000	12.978.246.000	12.978.246.000	21.628.568.000	21.628.568.000	35.565.288.000	35.565.288.000	5.800.000.000	5.800.000.000	-	-	451.957.137.000	451.957.137.000
257	Kota Surabaya	978.814.369.000	978.814.369.000	126.890.034.000	126.890.034.000	37.274.399.000	37.274.399.000	50.284.109.000	50.284.109.000	30.800.000.000	30.600.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	1.231.362.911.000	1.231.162.911.000
258	Kota Batu	413.545.049.000	413.545.049.000	5.835.360.000	5.835.360.000	16.833.573.000	16.833.573.000	25.612.300.000	25.612.300.000	1.000.000.000	1.000.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	470.126.282.000	470.126.282.000
259	Provinsi Kalimantan Barat	1.149.384.203.000	1.149.384.203.000	130.881.492.000	130.881.492.000	275.477.910.000	275.477.910.000	78.880.536.000	78.880.536.000	-	-	62.814.810.000	62.814.810.000	1.697.438.951.000	1.697.438.951.000
260	Kab. Bengkayang	366.963.275.000	366.963.275.000	52.281.774.000	52.281.774.000	99.657.148.000	99.657.148.000	21.717.204.000	21.717.204.000	400.000.000	400.000.000	37.308.640.000	37.308.640.000	578.328.041.000	578.328.041.000
261	Kab. Landak	433.422.629.000	433.422.629.000	52.487.880.000	52.487.880.000	107.687.988.000	107.687.988.000	32.709.842.000	32.709.842.000	-	-	29.217.512.000	29.217.512.000	655.525.851.000	655.525.851.000
262	Kab. Kapuas Hulu	639.972.953.000	639.972.953.000	35.343.414.000	35.343.414.000	140.686.661.000	140.686.661.000	46.600.713.000	46.600.713.000	800.000.000	800.000.000	60.874.974.000	60.874.974.000	924.278.715.000	924.278.715.000
263	Kab. Ketapang	611.729.032.000	611.729.032.000	160.825.986.000	160.825.986.000	154.856.304.000	154.856.304.000	73.481.756.000	73.481.756.000	1.800.000.000	1.800.000.000	88.375.620.000	88.375.620.000	1.091.068.698.000	1.091.068.698.000
264	Kab. Mempawah	395.825.508.000	395.825.508.000	31.601.436.000	31.601.436.000	69.369.778.000	69.369.778.000	43.880.824.000	43.880.824.000	1.400.000.000	1.400.000.000	14.812.252.000	14.812.252.000	556.889.798.000	556.889.798.000
265	Kab. Sambas	610.779.059.000	610.779.059.000	34.172.778.000	34.172.778.000	143.726.877.000	143.726.877.000	79.830.527.000	79.830.527.000	-	-	16.263.739.000	16.263.739.000	884.772.980.000	884.772.980.000
266	Kab. Sanggau	551.692.823.000	551.692.823.000	40.806.312.000	40.806.312.000	115.467.573.000	115.467.573.000	52.790.909.000	52.790.909.000	1.200.000.000	1.200.000.000	28.909.775.000	28.909.775.000	790.867.392.000	790.867.392.000
267	Kab. Sintang	542.889.697.000	542.889.697.000	70.541.406.000	70.541.406.000	147.425.846.000	147.425.846.000	50.806.513.000	50.806.513.000	3.200.000.000	3.200.000.000	76.637.845.000	76.637.845.000	891.501.307.000	891.501.307.000
268	Kota Pontianak	537.344.776.000	537.344.776.000	41.726.874.000	41.726.874.000	79.515.912.000	79.515.912.000	38.904.243.000	38.904.243.000	5.800.000.000	5.800.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	710.591.805.000	710.591.805.000
269	Kota Singkawang	345.644.466.000	345.644.466.000	24.035.478.000	24.035.478.000	64.188.376.000	64.188.376.000	28.896.186.000	28.896.186.000	5.200.000.000	5.200.000.000	10.199.403.000	10.199.403.000	478.163.909.000	478.163.909.000
270	Kab. Sekadau	315.760.571.000	315.760.571.000	30.712.296.000	30.712.296.000	85.403.963.000	85.403.963.000	31.144.904.000	31.144.904.000	-	-	22.403.225.000	22.403.225.000	485.424.959.000	485.424.959.000
271	Kab. Melawi	395.836.307.000	395.836.307.000	12.673.116.000	12.673.116.000	96.949.684.000	96.949.684.000	29.508.372.000	29.508.372.000	-	-	38.708.276.000	38.708.276.000	573.675.755.000	573.675.755.000
272	Kab. Kayong Utara	315.592.083.000	315.592.083.000	29.564.718.000	29.564.718.000	58.002.039.000	58.002.039.000	44.745.166.000	44.745.166.000	-	-	16.096.220.000	16.096.220.000	464.000.226.000	464.000.226.000
273	Kab. Kubu Raya	576.415.513.000	576.415.513.000	40.882.374.000	40.882.374.000	93.532.388.000	93.532.388.000	66.097.374.000	66.097.374.000	-	-	12.062.570.000	12.062.570.000	788.990.219.000	788.990.219.000
274	Provinsi Kalimantan Tengah	1.122.657.905.000	1.122.657.905.000	15.867.930.000	15.867.930.000	184.961.932.000	184.961.932.000	81.249.853.000	81.249.853.000	-	-	89.157.651.000	89.157.651.000	1.493.895.271.000	1.493.895.271.000
275	Kab. Barito Selatan	350.456.168.000	350.456.168.000	25.439.184.000	25.439.184.000	47.636.177.000	47.636.177.000	47.770.622.000	47.770.622.000	1.400.000.000	1.400.000.000	62.449.888.000	62.449.888.000	535.152.039.000	535.152.039.000
276	Kab. Barito Utara	362.715.783.000	362.715.783.000	44.132.010.000	44.132.010.000	35.630.030.000	35.630.030.000	34.891.817.000	34.891.817.000	2.000.000.000	2.000.000.000	39.812.031.000	39.812.031.000	519.181.671.000	519.181.671.000
277	Kab. Kapuas	528.751.665.000	528.751.665.000	45.362.532.000	45.362.532.000	83.451.729.000	83.451.729.000	73.097.909.000	73.097.909.000	3.400.000.000	3.400.000.000	74.667.396.000	74.667.396.000	808.731.231.000	808.731.231.000
278	Kab. Kotawaringin Barat	453.454.609.000	453.454.609.000	24.515.526.000	24.515.526.000	56.902.566.000	56.902.566.000	42.081.052.000	42.081.052.000	2.600.000.000	2.600.000.000	36.885.605.000	36.885.605.000	616.439.358.000	616.439.358.000
279	Kab. Kotawaringin Timur	520.216.037.000	520.216.037.000	68.569.824.000	68.569.824.000	93.164.104.000	93.164.104.000	60.883.781.000	60.883.781.000	3.400.000.000	3.400.000.000	58.944.203.000	58.944.203.000	805.177.949.000	805.177.949.000
280	Kota Palangkaraya	481.335.122.000	481.335.122.000	13.237.188.000	13.237.188.000	63.575.904.000	63.575.904.000	30.169.921.000	30.169.921.000	6.000.000.000	6.000.000.000	21.201.903.000	21.201.903.000	615.520.038.000	615.520.038.000
281	Kab. Katingan	414.065.152.000	414.065.152.000	47.220.348.000	47.220.348.000	77.537.469.000	77.537.469.000	65.614.113.000	65.614.113.000	1.400.000.000	1.400.000.000	43.807.982.000	43.807.982.000	649.645.064.000	649.645.064.000
282	Kab. Seruyan	392.811.949.000	392.811.949.000	10.735.476.000	10.735.476.000	75.570.524.000	75.570.524.000	42.723.186.000	42.723.186.000	600.000.000	600.000.000	57.575.184.000	57.575.184.000	580.016.319.000	580.016.319.000
283	Kab. Sukamara	270.677.772.000	270.677.772.000	11.375.592.000	11.375.592.000	42.765.856.000	42.765.856.000	21.410.793.000	21.410.793.000	600.000.000	600.000.000	50.713.174.000	50.713.174.000	397.543.187.000	397.543.187.000
284	Kab. Lamandau	326.608.626.000	326.608.626.000	12.111.666.000	12.111.666.000	30.526.822.000	30.526.822.000	35.621.812.000	35.621.812.000	600.000.000	600.000.000	30.529.830.000	30.529.830.000	435.998.756.000	435.998.756.000
285	Kab. Gunung Mas	297.211.128.000	297.211.128.000	76.278.654.000	76.278.654.000	68.778.331.000	68.778.331.000	38.447.627.000	38.447.627.000	2.600.000.000	2.600.000.000	46.050.483.000	46.050.483.000	529.366.223.000	529.366.223.000
286	Kab. Pulang Pisau	382.395.057.000	382.395.057.000	1.178.154.000	1.178.154.000	51.610.429.000	51.610.429.000	44.385.441.000	44.385.441.000	800.000.000	800.000.000	59.698.040.000	59.698.040.000	540.067.121.000	540.067.121.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAU Block Grant		DAU Specific Grant										Pagu	Realisasi
				Formasi PPPK		Bidang Pendidikan		Bidang Kesehatan		Kelurahan		Bidang Pekerjaan Umum			
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	)=(5)+(7)+(9)+(11)+(13)+(	(18)=(6)+(8)+(10)+(12)+(14)+(16)
287	Kab. Murung Raya	350.595.844.000	350.595.844.000	66.947.076.000	66.947.076.000	86.077.307.000	86.077.307.000	47.231.786.000	47.231.786.000	1.800.000.000	1.800.000.000	84.977.999.000	84.977.999.000	637.630.012.000	637.630.012.000
288	Kab. Barito Timur	328.353.323.000	328.353.323.000	806.664.000	806.664.000	41.918.154.000	41.918.154.000	38.798.349.000	38.798.349.000	600.000.000	600.000.000	46.654.599.000	46.654.599.000	457.131.089.000	457.131.089.000
289	Provinsi Kalimantan Selatan	844.492.839.000	844.492.839.000	85.842.714.000	85.842.714.000	96.747.104.000	96.747.104.000	80.956.813.000	80.956.813.000	-	-	23.571.304.000	23.571.304.000	1.131.610.774.000	1.131.610.774.000
290	Kab. Banjar	487.562.521.000	487.562.521.000	55.334.682.000	55.334.682.000	78.371.725.000	78.371.725.000	80.847.257.000	80.847.257.000	2.600.000.000	2.600.000.000	16.214.261.000	16.214.261.000	720.930.446.000	720.930.446.000
291	Kab. Barito Kuala	374.154.471.000	374.154.471.000	35.479.674.000	35.479.674.000	60.709.778.000	60.709.778.000	61.445.381.000	61.445.381.000	1.200.000.000	1.200.000.000	19.690.826.000	19.690.826.000	552.680.130.000	552.680.130.000
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	339.121.357.000	339.121.357.000	24.819.426.000	24.819.426.000	48.999.576.000	48.999.576.000	54.679.559.000	54.679.559.000	800.000.000	800.000.000	22.950.086.000	22.950.086.000	491.370.004.000	491.370.004.000
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	341.695.223.000	341.695.223.000	38.628.342.000	38.628.342.000	40.022.824.000	40.022.824.000	56.327.981.000	56.327.981.000	1.600.000.000	1.600.000.000	16.825.487.000	16.825.487.000	495.099.857.000	495.099.857.000
294	Kab. Hulu Sungai Utara	343.604.703.000	343.604.703.000	14.778.360.000	14.778.360.000	31.048.119.000	31.048.119.000	64.920.564.000	64.920.564.000	1.000.000.000	1.000.000.000	8.288.477.000	8.288.477.000	463.640.223.000	463.640.223.000
295	Kab. Kotabaru	399.046.737.000	399.046.737.000	34.106.118.000	34.106.118.000	84.099.143.000	84.099.143.000	52.062.946.000	52.062.946.000	800.000.000	399.844.000	37.499.776.000	37.499.776.000	607.614.720.000	607.214.564.000
296	Kab. Tabalong	338.531.108.000	338.531.108.000	32.417.028.000	32.417.028.000	38.426.920.000	38.426.920.000	36.140.241.000	36.140.241.000	2.000.000.000	2.000.000.000	19.871.474.000	19.871.474.000	467.386.771.000	467.386.771.000
297	Kab. Tanah Laut	337.371.475.000	337.371.475.000	41.779.068.000	41.779.068.000	51.977.805.000	51.977.805.000	41.733.239.000	41.733.239.000	1.000.000.000	1.000.000.000	38.246.623.000	38.246.623.000	512.108.210.000	512.108.210.000
298	Kab. Tapin	307.894.399.000	307.894.399.000	18.389.304.000	18.389.304.000	53.348.084.000	53.348.084.000	33.724.901.000	33.724.901.000	1.800.000.000	1.800.000.000	17.296.568.000	17.296.568.000	432.453.256.000	432.453.256.000
299	Kota Banjarbaru	343.967.021.000	343.967.021.000	12.907.896.000	12.907.896.000	32.765.083.000	32.765.083.000	26.122.297.000	26.122.297.000	4.000.000.000	4.000.000.000	8.187.008.000	8.187.008.000	427.949.305.000	427.949.305.000
300	Kota Banjarmasin	560.831.418.000	560.831.418.000	41.183.874.000	41.183.874.000	48.141.815.000	48.141.815.000	54.465.820.000	54.465.820.000	10.400.000.000	10.400.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	722.322.927.000	722.322.927.000
301	Kab. Balangan	252.984.493.000	252.984.493.000	18.510.840.000	18.510.840.000	28.068.021.000	28.068.021.000	34.448.060.000	34.448.060.000	600.000.000	600.000.000	27.241.308.000	27.241.308.000	361.852.722.000	361.852.722.000
302	Kab. Tanah Bumbu	308.460.529.000	308.460.529.000	22.439.802.000	22.439.802.000	49.296.003.000	49.296.003.000	32.094.482.000	32.094.482.000	1.000.000.000	1.000.000.000	30.925.386.000	30.925.386.000	444.216.202.000	444.216.202.000
303	Provinsi Kalimantan Timur	702.534.417.000	702.534.417.000	78.755.142.000	78.755.142.000	56.316.557.000	56.316.557.000	-	-	-	-	20.312.904.000	19.718.131.800	857.919.020.000	857.324.247.800
304	Kab. Berau	393.175.168.000	393.175.168.000	71.231.466.000	71.231.466.000	31.494.058.000	31.494.058.000	29.039.647.000	29.039.647.000	2.000.000.000	2.000.000.000	39.672.254.000	39.672.254.000	566.612.593.000	566.612.593.000
305	Kab. Kutai Kartanegara	365.964.641.000	365.964.641.000	49.270.188.000	49.270.188.000	26.388.663.000	26.388.663.000	27.973.332.000	27.973.332.000	8.800.000.000	8.800.000.000	15.850.661.000	15.850.661.000	494.247.485.000	494.247.485.000
306	Kab. Kutai Barat	341.744.669.000	341.744.669.000	85.055.502.000	85.055.502.000	51.130.457.000	51.130.457.000	24.011.263.000	24.011.263.000	800.000.000	400.000.000	60.942.888.000	60.942.888.000	563.684.779.000	563.284.779.000
307	Kab. Kutai Timur	384.176.681.000	384.176.681.000	92.187.354.000	92.187.354.000	53.130.481.000	53.130.481.000	27.327.007.000	27.327.007.000	400.000.000	400.000.000	22.519.116.000	22.519.116.000	579.740.639.000	579.740.639.000
308	Kab. Paser	273.996.940.000	273.996.940.000	29.515.434.000	29.515.434.000	45.836.481.000	45.835.300.000	20.733.755.000	20.733.300.000	1.000.000.000	999.304.750	21.342.682.000	6.370.313.000	392.425.292.000	377.450.591.750
309	Kota Balikpapan	372.544.749.000	372.544.749.000	46.750.434.000	46.750.434.000	21.293.236.000	21.293.236.000	16.448.943.000	16.448.943.000	6.800.000.000	6.800.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	471.137.362.000	471.137.362.000
310	Kota Bontang	169.705.154.000	169.705.154.000	25.619.346.000	25.619.346.000	26.424.333.000	26.424.333.000	8.519.508.000	8.519.508.000	3.000.000.000	3.000.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	240.568.341.000	240.568.341.000
311	Kota Samarinda	582.337.613.000	582.337.613.000	56.717.058.000	56.717.058.000	41.437.799.000	41.437.799.000	26.853.098.000	26.853.098.000	11.800.000.000	11.800.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	726.445.568.000	726.445.568.000
312	Kab. Penajam Paser Utara	202.984.019.000	202.984.019.000	24.741.042.000	24.741.042.000	23.365.523.000	23.365.523.000	16.880.729.000	16.880.729.000	4.800.000.000	4.800.000.000	14.540.347.000	14.540.347.000	287.311.660.000	287.311.660.000
313	Kab. Mahakam Ulu	253.195.938.000	253.195.938.000	20.099.628.000	20.099.628.000	48.526.451.000	48.526.451.000	17.548.827.000	17.548.827.000	-	-	119.581.429.000	119.581.429.000	458.952.273.000	458.952.273.000
314	Provinsi Sulawesi Utara	999.255.139.000	999.255.139.000	193.431.750.000	193.431.750.000	125.744.449.000	125.744.449.000	46.186.288.000	46.186.288.000	-	-	27.092.482.000	27.092.482.000	1.391.710.108.000	1.391.710.108.000
315	Kab. Bolaang Mongondow	368.588.800.000	368.588.800.000	41.378.340.000	41.378.340.000	61.631.581.000	61.631.581.000	48.630.480.000	48.630.480.000	400.000.000	400.000.000	13.699.925.000	13.699.925.000	534.329.126.000	534.329.126.000
316	Kab. Minahasa	468.410.133.000	468.410.133.000	42.331.458.000	42.331.458.000	72.262.093.000	72.262.093.000	48.066.971.000	48.066.971.000	8.600.000.000	8.600.000.000	10.822.254.000	10.822.254.000	650.492.909.000	650.492.909.000
317	Kab. Sangihe	356.633.453.000	356.633.453.000	29.074.788.000	29.074.788.000	57.816.881.000	57.816.881.000	41.165.953.000	41.165.953.000	4.400.000.000	4.400.000.000	25.990.098.000	25.990.098.000	515.081.173.000	515.081.173.000
318	Kota Bitung	362.459.397.000	362.459.397.000	12.883.554.000	12.883.554.000	52.466.195.000	52.466.195.000	34.444.185.000	34.444.185.000	13.800.000.000	13.800.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	483.353.331.000	483.353.331.000
319	Kota Manado	572.497.070.000	572.497.070.000	51.237.402.000	51.237.402.000	51.907.915.000	51.907.915.000	49.510.255.000	49.510.255.000	17.400.000.000	17.400.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	749.852.642.000	749.852.642.000
320	Kab. Kepulauan Talaud	357.807.769.000	357.807.769.000	16.949.826.000	16.949.826.000	45.095.827.000	45.095.827.000	38.218.963.000	38.218.963.000	2.200.000.000	2.200.000.000	16.633.409.000	16.633.409.000	476.905.794.000	476.905.794.000
321	Kab. Minahasa Selatan	369.361.993.000	369.361.993.000	32.664.522.000	32.664.522.000	59.112.348.000	59.112.348.000	43.978.872.000	43.978.872.000	2.000.000.000	2.000.000.000	17.563.308.000	17.563.308.000	524.681.043.000	524.681.043.000
322	Kota Tomohon	325.785.679.000	325.785.679.000	14.654.724.000	14.654.724.000	28.811.323.000	28.811.323.000	22.619.968.000	22.619.968.000	8.800.000.000	8.800.000.000	8.326.918.000	8.326.918.000	408.998.612.000	408.998.612.000
323	Kab. Minahasa Utara	351.282.492.000	351.282.492.000	26.779.326.000	26.779.326.000	62.765.413.000	62.765.413.000	34.001.178.000	34.001.178.000	1.200.000.000	1.200.000.000	9.627.728.000	9.627.728.000	485.656.137.000	485.656.137.000
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	289.598.836.000	289.598.836.000	13.545.372.000	13.545.372.000	37.145.158.000	37.145.158.000	27.815.993.000	27.815.993.000	2.000.000.000	2.000.000.000	8.643.386.000	8.643.386.000	378.748.745.000	378.748.745.000
325	Kota Kotamobagu	289.319.896.000	289.319.896.000	6.340.824.000	6.340.824.000	34.288.879.000	34.288.879.000	29.365.517.000	29.365.517.000	3.600.000.000	3.600.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	370.215.116.000	370.215.116.000
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	261.651.180.000	261.651.180.000	13.198.800.000	13.198.800.000	37.204.077.000	37.204.077.000	34.600.388.000	34.600.388.000	200.000.000	100.000.000	18.996.393.000	18.996.393.000	365.850.838.000	365.750.838.000
327	Kab. Minahasa Tenggara	292.931.660.000	292.931.660.000	6.935.208.000	6.935.208.000	43.417.279.000	43.417.279.000	29.265.321.000	29.265.321.000	1.800.000.000	1.800.000.000	22.273.545.000	22.273.545.000	396.623.013.000	396.623.013.000
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	209.988.934.000	209.988.934.000	31.371.996.000	31.371.996.000	35.623.744.000	35.623.744.000	31.104.096.000	31.104.096.000	-	-	31.507.433.000	31.507.433.000	339.596.203.000	339.596.203.000
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	217.258.400.000	217.258.400.000	16.443.708.000	16.443.708.000	38.160.880.000	38.160.880.000	34.724.792.000	34.724.792.000	-	-	38.754.627.000	38.754.627.000	345.342.407.000	345.342.407.000
330	Provinsi Sulawesi Tengah	943.755.219.000	943.755.219.000	229.363.686.000	229.363.686.000	193.811.353.000	193.811.353.000	96.078.444.000	96.078.444.000	-	-	98.224.504.000	98.224.504.000	1.561.233.206.000	1.561.233.206.000
331	Kab. Banggai	602.266.608.000	602.266.608.000	47.192.964.000	47.192.964.000	92.446.412.000	92.446.412.000	60.311.383.000	60.311.383.000	9.200.000.000	9.200.000.000	29.473.303.000	29.473.303.000	840.890.670.000	840.890.670.000
332	Kab. Banggai Kepulauan	259.311.602.000	259.311.602.000	55.010.334.000	55.010.334.000	59.647.171.000	59.647.171.000	42.752.315.000	42.752.315.000	600.000.000	600.000.000	42.583.069.000	42.583.069.000	459.904.491.000	459.904.491.000
333	Kab. Buol	295.557.899.000	295.557.899.000	50.482.200.000	50.482.200.000	61.545.177.000	61.545.177.000	39.108.598.000	39.108.598.000	1.400.000.000	1.400.000.000	48.994.326.000	48.994.326.000	497.088.200.000	497.088.200.000
334	Kab. Tolitoli	384.894.995.000	384.894.995.000	40.273.470.000	40.273.470.000	77.276.326.000	77.276.326.000	62.238.755.000	62.238.755.000	1.200.000.000	1.200.000.000	37.250.517.000	37.250.517.000	603.134.063.000	603.134.063.000
335	Kab. Donggala	406.134.367.000	406.134.367.000	50.637.516.000	50.637.516.000	94.163.636.000	94.163.636.000	61.643.732.000	61.643.732.000	1.800.000.000	1.800.000.000	34.414.833.000	34.414.833.000	648.794.084.000	648.794.084.000
336	Kab. Morowali	280.896.889.000	280.896.889.000	64.517.502.000	64.517.502.000	61.662.036.000	61.662.036.000	40.264.026.000	40.264.026.000	1.400.000.000	1.400.000.000	29.077.589.000	29.077.589.000	477.818.042.000	477.818.042.000
337	Kab. Poso	498.253.284.000	498.253.284.000	27.915.342.000	27.915.342.000	71.080.896.000	71.080.896.000	45.853.515.000	45.853.515.000	5.600.000.000	5.600.000.000	51.768.407.000	51.768.407.000	700.471.444.000	700.471.444.000
338	Kota Palu	523.927.011.000	523.927.011.000	32.499.222.000	32.499.222.000	47.099.870.000	47.099.870.000	46.873.408.000	46.873.408.000	9.200.000.000	9.200.000.000	7.666.675.000	7.666.675.000	667.266.186.000	667.266.186.000
339	Kab. Parigi Moutong	518.183.549.000	518.183.549.000	24.390.972.000	24.390.972.000	112.087.270.000	112.087.270.000	88.809.780.000	88.809.780.000	1.000.000.000	1.000.000.000	32.676.593.000	32.676.593.000	777.148.164.000	777.148.164.000
340	Kab. Tojo Una Una	351.506.694.000	351.506.694.000	34.303.560.000	34.303.560.000	66.428.846.000	66.428.846.000	53.500.133.000	53.500.133.000	2.400.000.000	2.400.000.000	57.908.842.000	57.908.842.000	566.048.075.000	566.048.075.000
341	Kab. Sigi	385.719.676.000	385.719.676.000	55.870.422.000	55.870.422.000	71.325.322.000	71.325.322.000	48.526.630.000	48.526.630.000	-	-	43.371.998.000	43.371.998.000	604.814.048.000	604.814.048.000
342	Kab. Banggai Laut	249.392.647.000	249.392.647.000	27.058.764.000	27.058.764.000	52.509.410.000	52.509.410.000	40.302.397.000	40.302.397.000	600.000.000	600.000.000	33.261.881.000	33.261.881.000	403.125.099.000	403.125.099.000
343	Kab. Morowali Utara	366.444.627.000	366.444.627.000	33.282.060.000	33.282.060.000	53.648.876.000	53.648.876.000	43.045.455.000	43.045.455.000	600.000.000	600.000.000	58.105.231.000	58.105.231.000	555.126.249.000	555.126.249.000
344	Provinsi Sulawesi Selatan	1.640.830.460.000	1.640.830.460.000	441.366.126.000	441.366.126.000	287.261.577.000	287.261.577.000	118.771.815.000	118.771.815.000	-	-	40.846.051.000	40.846.051.000	2.529.076.029.000	2.529.076.029.000
345	Kab. Bantaeng	357.768.479.000	357.768.479.000	13.213.836.000	13.213.836.000	59.937.779.000	59.937.779.000	38.627.152.000	38.627.152.000	4.200.000.000	4.200.000.000	17.023.783.000	17.023.783.000	490.771.029.000	490.771.029.000
346	Kab. Barru	388.444.759.000	388.444.759.000	14.858.412.000	14.858.412.000	36.191.312.000	36.191.312.000	44.456.967.000	44.456.967.000	3.000.000.000	3.000.000.000	12.617.422.000	12.617.422.000	499.568.872.000	499.568.872.000
347	Kab. Bone	742.494.387.000	742.494.387.000	87.679.002.000	87.679.002.000	111.259.736.000	111.259.736.000	116.908.638.000	116.908.638.000	8.800.000.000	8.800.000.000	20.936.021.000	20.936.021.000	1.088.077.784.000	1.088.077.784.000
348	Kab. Bulukumba	524.745.236.000	524.745.236.000	16.016.526.000	16.016.526.000	72.217.204.000	72.217.204.000	69.901.341.000	69.901.341.000	5.400.000.000	5.400.000.000	16.880.132.000	16.880.132.000	705.160.439.000	705.160.439.000
349	Kab. Enrekang	357.086.390.000	357.086.390.000	37.038.186.000	37.038.186.000	53.573.792.000	53.573.792.000	34.082.092.000	34.082.092.000	3.400.000.000	3.399.171.878	32.935.220.000	32.935.220.000	518.115.680.000	518.114.851.878
350	Kab. Gowa	600.330.038.000	600.330.038.000	82.373.340.000	82.373.340.000	101.036.256.000	101.036.256.000	66.549.409.000	66.549.409.000	9.200.000.000	9.200.000.000	21.212.535.000	21.212.535.000	880.701.578.000	880.701.578.000
351	Kab. Jeneponto	434.675.410.000	434.675.410.000	30.590.802.000	30.590.802.000	87.481.887.000	87.481.887.000	71.081.132.000	71.081.132.000	6.200.000.000	6.200.000.000	13.052.088.000	13.052.088.000	643.081.319.000	643.081.319.000
352	Kab. Luwu	497.725.471.000	497.725.471.000	24.170.004.000	24.170.004.000	66.358.371.000	66.358.371.000	49.961.186.000	49.961.186.000	4.000.000.000	4.000.000.000	54.705.099.000	54.705.099.000	696.920.131.000	696.920.131.000
353	Kab. Luwu Utara	457.507.969.000	457.507.969.000	34.976.130.000	34.976.130.000	67.620.863.000	67.620.863.000	55.482.599.000	55.482.599.000	1.400.000.000	1.400.000.000	44.162.242.000	44.162.242.000	661.149.803.000	661.149.803.000
354	Kab. Maros	524.203.609.000	524.203.609.000	24.553.638.000	24.553.638.000	73.465.301.000	73.465.301.000	61.169.901.000	61.169.901.000	4.600.000.000	4.600.000.000	15.112.625.000	15.112.625.000	703.105.074.000	703.105.074.000
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	525.006.602.000	525.006.602.000	20.742.732.000	20.742.732.000	95.203.827.000	95.203.827.000	76.278.006.000	76.278.006.000	7.600.000.000	7.600.000.000	17.501.031.000	17.501.031.000	742.332.198.000	742.332.198.000
356	Kota Palopo	410.922.130.000	410.922.130.000	5.455.596.000	5.455.596.000	36.324.540.000	36.324.540.000	34.896.808.000	34.896.808.000	9.600.000.000	9.600.000.000	7.588.437.000	7.588.437.000	504.787.511.000	504.787.511.000
357	Kab. Luwu Timur	381.701.679.000	381.701.679.000	40.981.974.000	40.981.974.000	44.571.683.000	44.571.683.000	36.082.508.000	36.082.508.000	600.000.000	600.000.000	34.213.938.000	34.213.938.000	538.151.782.000	538.151.782.000
358	Kab. Pinrang	506.838.552.000	506.838.552.000	29.254.092.000	29.254.092.000	87.311.127.000	87.311.127.000	59.294.646.000	59.294.646.000	8.000.000.000	8.000.000.000	15.210.129.000	15.210.129.000	705.908.546.000	705.908.546.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAU Block Grant		DAU Specific Grant										Pagu	Realisasi
				Formasi PPPK		Bidang Pendidikan		Bidang Kesehatan		Kelurahan		Bidang Pekerjaan Umum			
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	)=(5)+(7)+(9)+(11)+(13)+(	(18)=(6)+(8)+(10)+(12)+(14)+(16)
359	Kab. Sinjai	401.640.003.000	401.640.003.000	6.633.750.000	6.633.750.000	67.603.900.000	67.603.900.000	54.006.366.000	54.006.366.000	2.600.000.000	2.600.000.000	32.195.913.000	32.195.913.000	564.679.932.000	564.679.932.000
360	Kab. Kepulauan Selayar	401.711.201.000	401.711.201.000	17.413.392.000	17.413.392.000	66.111.815.000	66.111.815.000	48.629.409.000	48.629.409.000	1.400.000.000	1.400.000.000	49.162.157.000	49.162.157.000	584.427.974.000	584.427.974.000
361	Kab. Sidenreng Rappang	436.017.386.000	436.017.386.000	23.085.450.000	23.085.450.000	69.320.717.000	69.320.717.000	48.363.610.000	48.363.610.000	7.600.000.000	7.600.000.000	19.553.922.000	19.553.922.000	603.941.085.000	603.941.085.000
362	Kab. Soppeng	441.062.558.000	441.062.558.000	12.471.450.000	12.471.450.000	68.444.222.000	68.444.222.000	51.149.291.000	51.149.291.000	4.200.000.000	4.200.000.000	22.131.924.000	22.131.924.000	599.459.445.000	599.459.445.000
363	Kab. Takalar	423.905.783.000	423.905.783.000	13.766.358.000	13.766.358.000	78.459.711.000	78.459.711.000	58.868.666.000	58.868.666.000	4.800.000.000	4.800.000.000	9.568.633.000	9.568.633.000	589.369.151.000	589.369.151.000
364	Kab. Tana Toraja	389.502.187.000	389.502.187.000	38.183.010.000	38.183.010.000	74.641.390.000	74.641.390.000	24.112.810.000	24.112.810.000	9.400.000.000	9.400.000.000	36.441.352.000	36.441.352.000	572.280.749.000	572.280.749.000
365	Kab. Wajo	482.850.270.000	482.850.270.000	32.331.714.000	32.331.714.000	92.914.937.000	92.914.937.000	72.592.181.000	72.592.181.000	9.600.000.000	9.600.000.000	22.133.623.000	22.133.623.000	712.422.725.000	712.422.725.000
366	Kota Parepare	354.954.230.000	354.954.230.000	2.377.536.000	2.377.536.000	46.909.873.000	46.909.873.000	29.774.026.000	29.774.026.000	4.400.000.000	4.400.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	445.715.665.000	445.715.665.000
367	Kota Makassar	1.109.699.958.000	1.109.699.958.000	59.835.372.000	59.835.372.000	104.403.171.000	104.403.171.000	85.992.867.000	85.992.867.000	30.600.000.000	30.600.000.000	7.300.000.000	7.251.692.400	1.397.831.368.000	1.397.783.060.400
368	Kab. Toraja Utara	352.763.121.000	352.763.121.000	57.899.442.000	57.899.442.000	72.415.954.000	72.415.954.000	21.210.526.000	21.210.526.000	8.000.000.000	8.000.000.000	20.535.714.000	20.535.714.000	532.824.757.000	532.824.757.000
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	1.021.129.071.000	1.021.129.071.000	183.950.730.000	183.950.730.000	228.017.710.000	228.017.710.000	55.909.258.000	55.909.258.000	-	-	37.822.754.000	37.822.754.000	1.526.829.523.000	1.526.829.523.000
370	Kab. Buton	255.809.052.000	255.809.052.000	42.745.842.000	42.745.842.000	52.501.237.000	52.501.237.000	35.953.529.000	35.953.529.000	2.400.000.000	2.400.000.000	21.675.016.000	21.675.016.000	411.084.676.000	411.084.676.000
371	Kab. Konawe	384.477.100.000	384.477.100.000	121.451.448.000	121.451.448.000	84.269.856.000	84.269.856.000	51.404.193.000	51.404.193.000	11.400.000.000	11.400.000.000	24.757.687.000	24.757.687.000	677.760.284.000	677.760.284.000
372	Kab. Kolaka	396.905.722.000	396.905.722.000	29.653.218.000	29.653.218.000	69.012.160.000	69.012.160.000	37.751.029.000	37.751.029.000	7.000.000.000	7.000.000.000	21.301.222.000	21.301.222.000	561.623.351.000	561.623.351.000
373	Kab. Muna	434.735.859.000	434.735.859.000	25.083.762.000	25.083.762.000	87.171.710.000	87.171.710.000	44.485.485.000	44.485.485.000	5.200.000.000	5.200.000.000	36.541.102.000	36.541.102.000	633.217.918.000	633.217.918.000
374	Kota Kendari	496.892.220.000	496.892.220.000	42.977.106.000	42.977.106.000	65.755.804.000	65.755.804.000	27.755.374.000	27.755.374.000	13.000.000.000	13.000.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	653.680.504.000	653.680.504.000
375	Kota Bau-bau	413.037.079.000	413.037.079.000	3.555.690.000	3.555.690.000	37.984.184.000	37.984.184.000	33.185.522.000	33.185.522.000	8.600.000.000	8.600.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	503.662.475.000	503.662.475.000
376	Kab. Konawe Selatan	519.996.139.000	519.996.139.000	6.665.592.000	6.665.592.000	91.240.848.000	91.240.848.000	46.345.633.000	46.345.633.000	3.000.000.000	3.000.000.000	25.217.436.000	25.217.436.000	692.465.648.000	692.465.648.000
377	Kab. Bombana	315.118.101.000	315.118.101.000	33.823.632.000	33.823.632.000	54.260.703.000	54.260.703.000	38.188.053.000	38.188.053.000	4.400.000.000	4.400.000.000	23.400.092.000	23.400.092.000	469.190.581.000	469.190.581.000
378	Kab. Wakatobi	315.405.162.000	315.405.162.000	19.595.472.000	19.595.472.000	59.957.070.000	59.957.070.000	33.856.912.000	33.856.912.000	5.200.000.000	5.000.000.000	24.092.450.000	24.092.450.000	458.107.066.000	457.907.066.000
379	Kab. Kolaka Utara	349.767.808.000	349.767.808.000	12.548.904.000	12.548.904.000	50.900.001.000	50.900.001.000	36.064.283.000	36.064.283.000	1.200.000.000	1.200.000.000	20.514.243.000	20.514.243.000	470.995.239.000	470.995.239.000
380	Kab. Konawe Utara	292.042.206.000	292.042.206.000	17.731.116.000	17.731.116.000	43.016.936.000	43.016.936.000	30.726.383.000	30.726.383.000	2.200.000.000	2.200.000.000	53.326.847.000	53.326.847.000	439.043.488.000	439.043.488.000
381	Kab. Buton Utara	260.700.661.000	260.700.661.000	23.781.972.000	23.781.972.000	50.124.174.000	50.124.174.000	22.794.235.000	22.794.235.000	2.400.000.000	2.400.000.000	40.770.138.000	40.770.138.000	400.571.180.000	400.571.180.000
382	Kab. Konawe Kepulauan	215.485.210.000	215.485.210.000	19.889.292.000	19.889.292.000	26.347.363.000	26.347.363.000	26.743.501.000	26.743.501.000	1.400.000.000	1.400.000.000	26.070.944.000	26.070.944.000	315.936.310.000	315.936.310.000
383	Kab. Kolaka Timur	272.414.487.000	272.414.487.000	43.510.488.000	43.510.488.000	34.893.887.000	34.893.887.000	17.827.258.000	17.827.258.000	3.200.000.000	3.200.000.000	22.705.763.000	22.705.763.000	394.551.883.000	394.551.883.000
384	Kab. Muna Barat	242.351.013.000	242.351.013.000	19.608.366.000	19.608.366.000	40.148.530.000	40.148.530.000	24.097.890.000	24.097.890.000	1.000.000.000	1.000.000.000	27.165.268.000	27.165.268.000	354.371.067.000	354.371.067.000
385	Kab. Buton Tengah	249.417.141.000	249.417.141.000	14.752.968.000	14.752.968.000	46.554.965.000	46.554.965.000	33.671.242.000	33.671.242.000	2.000.000.000	2.000.000.000	8.947.747.000	8.947.747.000	355.344.063.000	355.344.063.000
386	Kab. Buton Selatan	249.311.286.000	249.311.286.000	18.269.634.000	18.269.634.000	36.673.499.000	36.673.499.000	32.908.926.000	32.908.926.000	2.000.000.000	2.000.000.000	11.414.057.000	11.414.057.000	350.577.402.000	350.577.402.000
387	Provinsi Bali	1.123.013.252.000	1.123.013.252.000	101.377.092.000	101.377.092.000	-	-	20.317.445.000	20.317.445.000	-	-	-	-	1.244.707.789.000	1.244.707.789.000
388	Kab. Badung	142.064.529.000	142.064.529.000	176.579.106.000	176.579.106.000	20.418.144.000	20.416.407.122	7.796.113.000	7.796.113.000	3.200.000.000	3.111.043.514	-	-	350.057.892.000	349.967.198.636
389	Kab. Bangli	463.481.193.000	463.481.193.000	9.206.862.000	9.206.862.000	15.145.849.000	15.145.849.000	32.046.587.000	32.046.587.000	800.000.000	800.000.000	27.870.637.000	27.870.637.000	548.551.128.000	548.551.128.000
390	Kab. Buleleng	710.589.462.000	710.589.462.000	81.091.908.000	81.091.908.000	65.245.588.000	65.245.588.000	52.529.022.000	52.529.022.000	3.800.000.000	3.800.000.000	19.488.563.000	19.488.563.000	932.744.543.000	932.744.543.000
391	Kab. Gianyar	579.171.673.000	579.171.673.000	48.962.790.000	48.962.790.000	-	-	24.817.191.000	24.817.191.000	1.200.000.000	1.200.000.000	7.504.478.000	7.504.478.000	661.656.132.000	661.656.132.000
392	Kab. Jembrana	429.279.551.000	429.279.551.000	29.533.212.000	29.533.212.000	14.349.740.000	14.349.740.000	25.093.574.000	25.093.574.000	2.000.000.000	2.000.000.000	36.005.551.000	36.005.551.000	536.261.628.000	536.261.628.000
393	Kab. Karangasem	542.850.280.000	542.850.280.000	13.617.762.000	13.617.762.000	81.829.552.000	81.829.552.000	47.567.236.000	47.567.236.000	600.000.000	600.000.000	39.022.959.000	39.022.959.000	725.487.789.000	725.487.789.000
394	Kab. Klungkung	445.623.095.000	445.623.095.000	7.618.650.000	7.618.650.000	18.574.430.000	18.574.430.000	30.590.153.000	30.590.153.000	1.200.000.000	1.200.000.000	12.845.645.000	12.845.645.000	516.451.973.000	516.451.973.000
395	Kab. Tabanan	654.956.527.000	654.956.527.000	45.480.738.000	45.480.738.000	20.536.679.000	20.536.679.000	29.152.167.000	29.152.167.000	-	-	22.830.796.000	22.830.796.000	772.956.907.000	772.956.907.000
396	Kota Denpasar	536.261.941.000	536.261.941.000	36.418.344.000	36.418.344.000	33.659.957.000	33.659.957.000	16.666.600.000	16.666.600.000	3.200.000.000	3.200.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	633.506.842.000	633.506.842.000
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.215.947.887.000	1.215.947.887.000	165.505.080.000	165.505.080.000	131.639.610.000	131.639.610.000	94.032.906.000	94.032.906.000	-	-	16.505.000.000	16.505.000.000	1.623.630.483.000	1.623.630.483.000
398	Kab. Bima	718.258.363.000	718.258.363.000	52.844.910.000	52.844.910.000	34.277.071.000	34.277.071.000	89.424.332.000	89.424.332.000	-	-	14.064.603.000	14.064.603.000	908.869.279.000	908.869.279.000
399	Kab. Dompu	434.476.044.000	434.476.044.000	29.454.270.000	29.454.270.000	34.388.540.000	34.388.540.000	52.613.142.000	52.613.142.000	1.800.000.000	1.800.000.000	13.359.916.000	13.359.916.000	566.091.912.000	566.091.912.000
400	Kab. Lombok Barat	638.611.995.000	638.611.995.000	24.320.526.000	24.320.526.000	50.157.673.000	50.157.673.000	77.714.880.000	77.714.880.000	600.000.000	600.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	798.705.074.000	798.705.074.000
401	Kab. Lombok Tengah	799.447.572.000	799.447.572.000	63.507.342.000	63.507.342.000	65.536.382.000	65.536.382.000	109.281.363.000	109.281.363.000	2.400.000.000	2.400.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	1.047.472.659.000	1.047.472.659.000
402	Kab. Lombok Timur	880.627.964.000	880.627.964.000	107.545.380.000	107.545.380.000	75.077.215.000	75.077.215.000	122.818.133.000	122.818.133.000	3.000.000.000	3.000.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	1.196.368.692.000	1.196.368.692.000
403	Kab. Sumbawa	641.783.804.000	641.783.804.000	72.243.564.000	72.243.564.000	47.290.545.000	47.290.545.000	77.857.046.000	77.857.046.000	1.600.000.000	1.600.000.000	13.876.468.000	13.876.468.000	854.651.427.000	854.651.427.000
404	Kota Mataram	550.253.941.000	550.253.941.000	18.994.560.000	18.994.560.000	-	-	35.225.958.000	35.225.958.000	10.000.000.000	10.000.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	621.774.459.000	621.774.459.000
405	Kota Bima	391.457.287.000	391.457.287.000	14.835.300.000	14.835.300.000	-	-	32.159.014.000	32.159.014.000	8.200.000.000	8.200.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	453.951.601.000	453.951.601.000
406	Kab. Sumbawa Barat	309.365.753.000	309.365.753.000	27.246.660.000	27.246.660.000	10.173.728.000	10.173.728.000	33.289.874.000	33.289.874.000	1.400.000.000	1.400.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	388.776.015.000	388.776.015.000
407	Kab. Lombok Utara	308.461.280.000	308.461.280.000	18.104.868.000	18.104.868.000	31.529.595.000	31.529.595.000	38.388.007.000	38.388.007.000	-	-	7.300.000.000	7.260.000.000	403.783.750.000	403.743.750.000
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.391.440.101.000	1.391.440.101.000	2.324.466.000	2.324.466.000	305.656.333.000	305.656.333.000	96.144.585.000	96.144.585.000	-	-	81.043.493.000	81.043.493.000	1.876.608.978.000	1.876.608.978.000
409	Kab. Alor	402.611.735.000	402.611.735.000	28.634.454.000	28.634.454.000	73.460.421.000	73.460.421.000	61.168.574.000	61.168.574.000	3.400.000.000	3.400.000.000	28.194.746.000	28.194.746.000	597.469.930.000	597.469.930.000
410	Kab. Belu	329.638.094.000	329.638.094.000	39.369.240.000	39.369.240.000	59.476.881.000	59.476.881.000	51.590.520.000	51.590.520.000	2.400.000.000	2.400.000.000	7.951.785.000	7.951.785.000	490.426.520.000	490.426.520.000
411	Kab. Ende	380.200.206.000	380.200.206.000	81.298.836.000	81.298.836.000	73.941.140.000	73.941.140.000	60.203.289.000	60.203.289.000	4.600.000.000	4.600.000.000	21.876.283.000	21.876.283.000	622.119.754.000	622.119.754.000
412	Kab. Flores Timur	432.491.952.000	432.491.952.000	29.298.576.000	29.298.576.000	72.601.942.000	72.601.942.000	61.343.421.000	61.343.421.000	4.200.000.000	4.200.000.000	16.310.368.000	16.310.368.000	616.246.259.000	616.246.259.000
413	Kab. Kupang	491.178.047.000	491.178.047.000	16.324.332.000	16.324.332.000	75.527.795.000	75.527.795.000	70.652.164.000	70.652.164.000	3.400.000.000	3.400.000.000	14.804.419.000	14.804.419.000	671.886.757.000	671.886.757.000
414	Kab. Lembata	320.340.185.000	320.340.185.000	21.993.642.000	21.993.642.000	51.687.060.000	51.687.060.000	39.076.661.000	39.076.661.000	1.400.000.000	1.400.000.000	22.496.388.000	22.496.388.000	456.993.936.000	456.993.936.000
415	Kab. Manggarai	396.267.870.000	396.267.870.000	42.494.142.000	42.494.142.000	73.065.550.000	73.065.550.000	48.466.336.000	48.466.336.000	5.200.000.000	5.200.000.000	30.805.463.000	30.805.463.000	596.299.361.000	596.299.361.000
416	Kab. Ngada	326.149.642.000	326.149.642.000	26.967.144.000	26.967.144.000	40.343.686.000	40.343.686.000	35.172.956.000	35.172.956.000	3.200.000.000	3.200.000.000	30.882.197.000	30.882.197.000	462.715.625.000	462.715.625.000
417	Kab. Sikka	417.920.686.000	417.920.686.000	51.207.624.000	51.207.624.000	76.019.183.000	76.019.183.000	53.566.257.000	53.566.257.000	2.600.000.000	2.600.000.000	18.259.861.000	18.259.861.000	619.573.611.000	619.573.611.000
418	Kab. Sumba Barat	246.332.029.000	246.332.029.000	41.046.234.000	41.046.234.000	52.547.009.000	52.547.009.000	34.003.957.000	34.003.957.000	2.200.000.000	2.200.000.000	16.958.011.000	16.958.011.000	393.087.240.000	393.087.240.000
419	Kab. Sumba Timur	346.837.636.000	346.837.636.000	102.744.540.000	102.744.540.000	83.184.627.000	83.184.627.000	56.771.707.000	56.771.707.000	3.200.000.000	3.200.000.000	40.112.029.000	40.112.029.000	632.850.539.000	632.850.539.000
420	Kab. Timor Tengah Selatan	400.252.909.000	400.252.909.000	154.010.490.000	154.010.490.000	113.093.277.000	113.093.277.000	69.747.729.000	69.747.729.000	2.400.000.000	2.400.000.000	29.782.769.000	29.782.769.000	769.287.174.000	769.287.174.000
421	Kab. Timor Tengah Utara	381.231.334.000	381.231.334.000	54.311.952.000	54.311.952.000	74.115.022.000	74.115.022.000	50.239.561.000	50.239.561.000	6.600.000.000	2.199.682.189	22.096.644.000	22.096.644.000	588.594.513.000	584.194.195.189
422	Kota Kupang	524.595.044.000	524.595.044.000	25.291.878.000	25.291.878.000	40.018.613.000	40.018.613.000	50.227.412.000	50.227.412.000	10.200.000.000	10.200.000.000	10.585.974.000	10.585.974.000	660.918.921.000	660.918.921.000
423	Kab. Rote Ndao	287.608.531.000	287.608.531.000	39.800.328.000	39.800.328.000	49.307.233.000	49.307.233.000	44.012.182.000	44.012.182.000	1.400.000.000	1.400.000.000	16.832.879.000	16.832.879.000	438.961.153.000	438.961.153.000
424	Kab. Manggarai Barat	325.022.076.000	325.022.076.000	68.946.198.000	68.946.198.000	63.930.732.000	63.930.732.000	44.172.794.000	44.172.794.000	1.000.000.000	1.000.000.000	30.171.573.000	30.171.573.000	533.243.373.000	533.243.373.000
425	Kab. Nagekeo	311.632.552.000	311.632.552.000	16.658.886.000	16.658.886.000	44.147.719.000	44.147.719.000	37.161.527.000	37.161.527.000	3.200.000.000	3.200.000.000	16.796.038.000	16.796.038.000	429.596.722.000	429.596.722.000
426	Kab. Sumba Barat Daya	321.405.410.000	321.405.410.000	17.694.414.000	17.694.414.000	102.056.368.000	102.056.368.000	36.961.914.000	36.961.914.000	400.000.000	400.000.000	24.546.832.000	24.546.832.000	503.064.938.000	503.064.938.000
427	Kab. Sumba Tengah	201.545.358.000	201.545.358.000	43.978.338.000	43.978.338.000	37.467.820.000	37.467.820.000	24.798.276.000	24.798.276.000	-	-	40.951.330.000	40.951.330.000	348.741.122.000	348.741.122.000
428	Kab. Manggarai Timur	319.601.816.000	319.601.816.000	54.644.274.000	54.644.274.000	69.385.035.000	69.385.035.000	40.960.176.000	40.960.176.000	3.400.000.000	3.400.000.000	35.374.720.000	35.374.720.000	523.366.021.000	523.366.021.000
429	Kab. Sabu Raijua	232.634.823.000	232.634.823.000	24.265.872.000	24.265.872.000	33.816.774.000	33.816.774.000	34.212.004.000	34.212.004.000	1.000.000.000	1.000.000.000	28.757.276.000	28.757.276.000	354.686.749.000	354.686.749.000
430	Kab. Malaka	305.578.270.000	305.578.270.000	23.202.486.000	23.202.486.000	60.386.472.000	60.386.472.000	44.482.057.000	44.482.057.000	-	-	9.287.503.000	9.287.503.000	442.936.788.000	442.936.788.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAU Block Grant		DAU Specific Grant										Pagu	Realisasi
				Formasi PPPK		Bidang Pendidikan		Bidang Kesehatan		Kelurahan		Bidang Pekerjaan Umum			
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	)=(5)+(7)+(9)+(11)+(13)+(	(18)=(6)+(8)+(10)+(12)+(14)+(16)
431	Provinsi Maluku	1.124.297.924.000	1.124.297.924.000	104.502.354.000	104.502.354.000	185.981.187.000	185.981.187.000	82.869.606.000	82.869.606.000	-	-	81.139.852.000	81.139.852.000	1.578.790.923.000	1.578.790.923.000
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	357.426.722.000	357.426.722.000	31.701.804.000	31.701.804.000	80.351.897.000	80.351.897.000	56.816.752.000	56.816.752.000	400.000.000	400.000.000	18.581.947.000	18.581.947.000	545.279.122.000	545.279.122.000
433	Kab. Maluku Tengah	707.451.425.000	707.451.425.000	34.169.964.000	34.169.964.000	82.472.581.000	82.472.581.000	90.717.500.000	90.717.500.000	1.200.000.000	1.200.000.000	26.134.815.000	26.134.815.000	942.146.285.000	942.146.285.000
434	Kab. Maluku Tenggara	313.141.716.000	313.141.716.000	32.949.276.000	32.949.276.000	44.235.135.000	44.235.135.000	43.964.611.000	43.964.611.000	200.000.000	200.000.000	37.524.693.000	37.524.693.000	472.015.431.000	472.015.431.000
435	Kab. Buru	313.367.213.000	313.367.213.000	44.151.930.000	44.151.930.000	41.811.771.000	32.281.888.250	38.892.794.000	38.892.794.000	-	-	60.440.469.000	51.611.260.885	498.664.177.000	480.305.086.135
436	Kota Ambon	502.532.200.000	502.532.200.000	47.587.872.000	47.587.872.000	50.992.494.000	50.992.494.000	47.269.014.000	47.269.014.000	4.000.000.000	4.000.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	659.681.580.000	659.681.580.000
437	Kab. Seram Bagian Barat	421.432.562.000	421.432.562.000	13.503.828.000	13.503.828.000	69.006.038.000	69.006.038.000	63.572.114.000	63.572.114.000	-	-	17.451.972.000	17.451.652.000	584.966.514.000	584.966.194.000
438	Kab. Seram Bagian Timur	335.025.495.000	335.025.495.000	41.766.078.000	41.766.078.000	57.087.288.000	57.087.288.000	53.587.592.000	53.587.592.000	-	-	33.758.484.000	33.758.484.000	521.224.937.000	521.224.937.000
439	Kab. Kepulauan Aru	359.750.474.000	359.750.474.000	44.124.354.000	44.124.354.000	66.034.819.000	66.034.819.000	56.170.302.000	56.170.302.000	400.000.000	388.225.100	48.722.354.000	48.722.354.000	575.202.303.000	575.190.528.100
440	Kota Tual	262.805.781.000	262.805.781.000	37.601.166.000	37.601.166.000	29.415.087.000	29.415.087.000	38.120.357.000	38.120.357.000	600.000.000	600.000.000	12.910.670.000	12.910.670.000	381.453.061.000	381.453.061.000
441	Kab. Maluku Barat Daya	331.938.847.000	331.938.847.000	41.499.918.000	41.499.918.000	58.337.789.000	58.337.789.000	46.251.988.000	46.251.988.000	200.000.000	200.000.000	74.352.373.000	74.352.373.000	552.580.915.000	552.580.915.000
442	Kab. Buru Selatan	243.130.880.000	243.130.880.000	60.427.164.000	60.427.164.000	48.320.534.000	48.320.534.000	36.539.351.000	36.539.351.000	-	-	30.399.449.000	30.399.449.000	418.817.378.000	418.817.378.000
443	Provinsi Papua	673.096.641.000	673.096.641.000	5.438.497.000	5.438.497.000	35.570.177.000	35.570.177.000	51.648.208.000	51.648.208.000	-	-	58.482.785.000	58.482.785.000	824.236.308.000	824.236.308.000
444	Kab. Biak Numfor	402.368.582.000	402.368.582.000	12.157.872.000	12.157.872.000	76.673.529.000	76.673.529.000	41.817.367.000	41.817.367.000	2.800.000.000	2.800.000.000	29.645.912.000	29.645.912.000	565.463.262.000	565.463.262.000
445	Kab. Jayapura	496.260.690.000	496.260.690.000	19.102.764.000	19.102.764.000	60.197.568.000	60.197.568.000	60.014.484.000	60.014.484.000	1.000.000.000	1.000.000.000	25.783.780.000	25.768.718.412	662.359.286.000	662.344.224.412
446	Kab. Jayawijaya	500.524.086.000	500.524.086.000	31.527.774.000	31.527.774.000	67.191.186.000	67.191.186.000	82.228.609.000	82.228.609.000	800.000.000	800.000.000	15.996.500.000	15.996.500.000	698.268.155.000	698.268.155.000
447	Kab. Merauke	878.705.191.000	878.705.191.000	4.489.722.000	4.489.722.000	129.222.978.000	129.222.978.000	94.967.323.000	94.967.323.000	2.200.000.000	2.200.000.000	71.899.737.000	71.899.737.000	1.181.484.951.000	1.181.484.951.000
448	Kab. Mimika	481.411.157.000	481.411.157.000	1.687.626.000	1.687.626.000	55.200.363.000	55.200.363.000	30.112.333.000	30.112.333.000	3.800.000.000	3.800.000.000	11.545.763.000	11.545.763.000	583.757.242.000	583.757.242.000
449	Kab. Nabire	484.015.853.000	484.015.853.000	45.960.138.000	45.960.138.000	74.659.221.000	74.659.221.000	54.541.258.000	54.541.258.000	1.800.000.000	1.800.000.000	35.165.018.000	35.165.018.000	696.141.488.000	696.141.488.000
450	Kab. Paniai	377.648.976.000	377.648.976.000	5.996.910.000	5.996.910.000	107.789.255.000	107.789.255.000	51.696.420.000	51.696.420.000	1.000.000.000	-	18.886.341.000	18.886.341.000	563.017.902.000	562.017.902.000
451	Kab. Puncak Jaya	586.229.806.000	586.229.806.000	2.112.186.000	2.112.186.000	20.801.915.000	20.783.915.000	96.590.092.000	96.590.092.000	600.000.000	369.169.300	9.843.261.000	9.397.187.346	716.177.260.000	715.482.355.646
452	Kab. Kepulauan Yapen	386.392.245.000	386.392.245.000	3.003.762.000	3.003.762.000	73.686.376.000	73.686.376.000	41.028.589.000	41.028.589.000	1.000.000.000	1.000.000.000	34.402.669.000	34.351.006.000	539.513.641.000	539.461.978.000
453	Kota Jayapura	531.784.879.000	531.784.879.000	562.542.000	562.542.000	48.750.473.000	48.750.473.000	47.003.742.000	47.003.742.000	5.000.000.000	5.000.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	640.401.636.000	640.401.636.000
454	Kab. Sarmi	442.098.046.000	442.098.046.000	2.547.360.000	2.547.360.000	68.694.933.000	68.694.933.000	45.483.312.000	45.483.312.000	400.000.000	400.000.000	97.194.504.000	97.194.504.000	656.418.155.000	656.418.155.000
455	Kab. Keerom	347.856.825.000	347.856.825.000	8.353.914.000	8.353.914.000	54.410.747.000	54.410.747.000	40.157.411.000	40.157.411.000	-	-	63.703.490.000	63.703.490.000	514.482.387.000	514.482.387.000
456	Kab. Yahukimo	537.187.414.000	537.187.414.000	11.197.770.000	11.197.770.000	93.560.788.000	93.560.788.000	77.962.080.000	77.962.080.000	200.000.000	200.000.000	12.937.176.000	12.937.176.000	733.045.228.000	733.045.228.000
457	Kab. Pegunungan Bintang	531.499.978.000	531.499.978.000	10.497.246.000	10.497.246.000	68.788.269.000	68.788.269.000	77.956.260.000	77.956.260.000	-	-	104.103.611.000	104.103.611.000	792.845.364.000	792.845.364.000
458	Kab. Tolikara	537.380.185.000	537.380.185.000	8.204.622.000	8.204.622.000	51.701.780.000	51.701.780.000	81.639.055.000	81.639.055.000	800.000.000	800.000.000	24.604.035.000	24.604.035.000	704.329.677.000	704.329.677.000
459	Kab. Boven Digoel	492.356.084.000	492.356.084.000	5.816.472.000	5.816.472.000	99.169.786.000	99.169.786.000	63.091.459.000	63.091.459.000	-	-	114.875.194.000	114.875.194.000	775.308.995.000	775.308.995.000
460	Kab. Mappi	429.850.218.000	429.850.218.000	8.735.322.000	8.735.322.000	132.296.807.000	132.296.807.000	53.379.472.000	53.379.472.000	400.000.000	391.656.450	102.417.386.000	102.417.386.000	727.079.205.000	727.070.861.450
461	Kab. Asmat	535.385.953.000	535.385.953.000	8.799.006.000	8.799.006.000	135.369.271.000	135.369.271.000	75.712.702.000	75.712.702.000	-	-	91.435.598.000	91.435.598.000	846.702.530.000	846.702.530.000
462	Kab. Waropen	398.778.697.000	398.778.697.000	1.698.240.000	1.698.240.000	46.155.788.000	46.155.788.000	42.961.673.000	42.961.673.000	-	-	54.237.551.000	54.237.551.000	543.831.949.000	543.831.949.000
463	Kab. Supiori	295.262.705.000	295.262.705.000	2.536.746.000	2.536.746.000	55.823.881.000	55.823.881.000	35.384.815.000	35.384.815.000	-	-	39.500.585.000	39.500.585.000	428.508.732.000	428.508.732.000
464	Kab. Mamberamo Raya	402.822.325.000	402.822.325.000	1.761.924.000	1.761.924.000	67.160.261.000	67.160.261.000	47.364.582.000	47.364.582.000	-	-	174.974.950.000	174.924.950.000	694.084.042.000	694.034.042.000
465	Kab. Mamberamo Tengah	428.361.552.000	428.361.552.000	7.949.094.000	7.949.094.000	52.338.874.000	52.338.874.000	65.227.067.000	65.227.067.000	-	-	60.187.426.000	60.187.426.000	614.064.013.000	614.064.013.000
466	Kab. Yalimo	452.778.277.000	452.778.277.000	1.475.346.000	1.475.346.000	48.748.642.000	48.748.642.000	67.905.719.000	67.905.719.000	-	-	12.347.869.000	12.347.869.000	583.255.853.000	583.255.853.000
467	Kab. Lanny Jaya	468.417.210.000	468.417.210.000	12.934.878.000	12.934.878.000	61.411.215.000	61.411.215.000	66.155.049.000	66.155.049.000	200.000.000	200.000.000	12.919.121.000	12.919.121.000	622.037.473.000	622.037.473.000
468	Kab. Nduga	434.149.014.000	434.149.014.000	3.376.344.000	3.376.344.000	29.557.809.000	29.557.809.000	68.683.654.000	68.683.654.000	-	-	45.201.424.000	45.201.424.000	580.968.245.000	580.968.245.000
469	Kab. Dogiyai	324.946.937.000	324.946.937.000	13.215.822.000	13.215.822.000	72.565.992.000	72.565.992.000	49.187.511.000	49.187.511.000	-	-	14.713.393.000	14.713.393.000	474.629.655.000	474.629.655.000
470	Kab. Puncak	603.856.992.000	603.856.992.000	12.832.170.000	12.832.170.000	18.571.584.000	18.571.584.000	94.505.127.000	94.505.127.000	-	-	32.883.189.000	32.883.189.000	762.649.062.000	762.649.062.000
471	Kab. Intan Jaya	511.368.899.000	511.368.899.000	1.146.312.000	1.146.312.000	25.115.086.000	25.115.086.000	77.550.420.000	77.550.420.000	-	-	36.426.183.000	36.426.183.000	651.606.900.000	651.606.900.000
472	Kab. Deiyai	325.728.129.000	325.728.129.000	8.479.140.000	8.479.140.000	63.517.852.000	63.517.852.000	46.387.185.000	46.387.185.000	-	-	23.978.843.000	23.978.843.000	468.091.149.000	468.091.149.000
473	Provinsi Maluku Utara	842.255.046.000	842.255.046.000	117.813.786.000	117.813.786.000	138.897.109.000	138.897.109.000	61.836.974.000	61.836.974.000	-	-	105.471.613.000	105.470.519.900	1.266.274.528.000	1.266.273.434.900
474	Kab. Halmahera Tengah	288.648.131.000	288.648.131.000	37.092.924.000	37.092.924.000	31.912.984.000	31.912.984.000	46.469.449.000	46.469.449.000	-	-	26.075.444.000	25.997.132.185	430.198.932.000	430.120.620.185
475	Kota Ternate	505.079.650.000	505.079.650.000	13.719.420.000	13.719.420.000	27.471.331.000	27.471.331.000	40.046.497.000	40.046.497.000	15.600.000.000	15.600.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	609.216.898.000	609.216.898.000
476	Kab. Halmahera Barat	348.918.066.000	348.918.066.000	17.084.556.000	17.084.556.000	41.931.689.000	41.931.689.000	45.623.868.000	45.623.868.000	-	-	21.771.994.000	21.771.994.000	475.330.173.000	475.330.173.000
477	Kab. Halmahera Timur	304.229.374.000	304.229.374.000	37.193.112.000	37.193.112.000	38.067.209.000	38.067.209.000	32.415.809.000	32.415.809.000	-	-	51.484.159.000	51.484.159.000	463.389.663.000	463.389.663.000
478	Kab. Halmahera Selatan	445.129.062.000	445.129.062.000	81.506.952.000	81.506.952.000	84.601.649.000	84.601.649.000	67.688.834.000	67.688.828.240	-	-	41.151.866.000	41.151.866.000	720.078.363.000	720.078.357.240
479	Kab. Halmahera Utara	328.159.726.000	328.159.726.000	47.834.256.000	47.834.256.000	47.791.043.000	47.791.043.000	38.196.076.000	38.196.076.000	-	-	7.903.047.000	7.903.047.000	469.884.148.000	469.884.148.000
480	Kab. Kepulauan Sula	337.396.037.000	337.396.037.000	11.891.748.000	11.891.748.000	43.708.701.000	43.708.701.000	50.101.556.000	50.101.556.000	-	-	25.825.585.000	25.825.585.000	468.923.627.000	468.923.627.000
481	Kota Tidore Kepulauan	404.094.793.000	404.094.793.000	16.129.752.000	16.129.752.000	37.584.324.000	37.584.324.000	41.856.840.000	41.856.840.000	8.000.000.000	8.000.000.000	15.661.226.000	15.661.226.000	523.326.935.000	523.326.935.000
482	Kab. Pulau Morotai	284.557.266.000	284.557.266.000	14.277.084.000	14.277.084.000	32.246.440.000	32.246.440.000	35.631.299.000	35.631.299.000	-	-	11.816.197.000	11.816.197.000	378.528.286.000	378.528.286.000
483	Kab. Pulau Taliabu	198.521.691.000	198.521.691.000	38.403.486.000	38.403.486.000	41.525.188.000	41.525.188.000	32.575.242.000	32.575.242.000	-	-	35.260.390.000	35.260.390.000	346.285.997.000	346.285.997.000
484	Provinsi Banten	859.066.873.000	859.066.873.000	90.574.428.000	90.574.428.000	105.328.179.000	105.328.179.000	37.279.896.000	37.279.849.733	-	-	16.505.000.000	16.505.000.000	1.108.754.376.000	1.108.754.329.733
485	Kab. Lebak	629.388.700.000	629.388.700.000	117.324.582.000	117.324.582.000	179.914.591.000	179.914.591.000	111.710.068.000	111.710.068.000	1.000.000.000	1.000.000.000	29.527.668.000	29.527.668.000	1.068.865.609.000	1.068.865.609.000
486	Kab. Pandeglang	686.807.496.000	686.807.496.000	116.017.674.000	116.017.674.000	184.951.620.000	184.951.620.000	137.252.367.000	137.252.367.000	2.600.000.000	2.600.000.000	31.249.597.000	31.249.597.000	1.158.878.754.000	1.158.878.754.000
487	Kab. Serang	720.795.927.000	720.795.927.000	28.562.274.000	28.562.274.000	175.638.250.000	175.638.250.000	130.579.252.000	130.579.252.000	-	-	11.324.638.000	11.324.638.000	1.066.900.341.000	1.066.900.341.000
488	Kab. Tangerang	860.945.756.000	860.945.756.000	76.794.438.000	76.794.438.000	172.057.461.000	172.057.461.000	104.039.013.000	104.039.013.000	5.600.000.000	5.600.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	1.226.736.668.000	1.226.736.668.000
489	Kota Cilegon	455.617.612.000	455.617.612.000	48.126.348.000	48.126.348.000	27.284.046.000	27.284.046.000	61.437.507.000	61.437.507.000	8.600.000.000	8.600.000.000	8.346.008.000	8.346.008.000	609.411.521.000	609.411.521.000
490	Kota Tangerang	742.334.623.000	742.334.623.000	4.967.352.000	4.967.352.000	65.843.239.000	65.843.239.000	59.661.150.000	59.661.150.000	20.800.000.000	20.800.000.000	-	-	893.606.364.000	893.606.364.000
491	Kota Serang	419.397.464.000	419.397.464.000	61.608.990.000	61.608.990.000	65.316.582.000	65.316.582.000	61.381.871.000	61.381.871.000	13.400.000.000	13.400.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	628.404.907.000	628.404.907.000
492	Kota Tangerang Selatan	405.182.463.000	405.182.463.000	114.413.334.000	114.413.334.000	20.349.093.000	20.349.093.000	33.054.908.000	33.054.908.000	10.800.000.000	10.800.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	591.099.798.000	591.099.798.000
493	Provinsi Bangka Belitung	766.951.521.000	766.951.521.000	27.134.646.000	27.134.646.000	134.734.239.000	134.734.239.000	28.463.429.000	28.463.429.000	-	-	16.505.000.000	16.505.000.000	973.788.835.000	973.788.835.000
494	Kab. Bangka	368.958.609.000	368.958.609.000	32.056.050.000	32.056.050.000	56.629.810.000	56.629.810.000	30.535.361.000	30.535.361.000	3.800.000.000	3.800.000.000	15.728.157.000	15.728.157.000	507.707.987.000	507.707.987.000
495	Kab. Belitung	348.439.864.000	348.439.864.000	15.160.980.000	15.160.980.000	63.571.218.000	63.571.218.000	27.025.633.000	27.025.633.000	1.400.000.000	1.400.000.000	13.972.639.000	13.972.639.000	469.570.334.000	469.570.334.000
496	Kota Pangkal Pinang	351.314.441.000	351.314.441.000	10.185.672.000	10.185.672.000	44.719.263.000	44.719.263.000	17.938.169.000	17.938.169.000	8.400.000.000	8.400.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	439.857.545.000	439.857.545.000
497	Kab. Bangka Selatan	312.259.011.000	312.259.011.000	16.700.982.000	16.700.982.000	62.998.235.000	62.998.235.000	35.114.010.000	35.114.010.000	600.000.000	600.000.000	22.792.229.000	22.792.229.000	450.464.467.000	450.464.467.000
498	Kab. Bangka Tengah	321.698.768.000	321.698.768.000	13.060.956.000	13.060.956.000	64.434.846.000	64.434.846.000	24.681.161.000	24.681.161.000	1.400.000.000	1.400.000.000	7.608.575.000	7.608.575.000	432.884.306.000	432.884.306.000
499	Kab. Bangka Barat	299.372.212.000	299.372.212.000	23.011.314.000	23.011.314.000	68.893.992.000	68.893.992.000	28.381.201.000	28.381.201.000	1.200.000.000	600.000.000	14.427.312.000	14.427.312.000	435.286.031.000	434.686.031.000
500	Kab. Belitung Timur	318.135.059.000	318.135.059.000	18.190.218.000	18.190.218.000	52.079.710.000	52.079.710.000	21.325.354.000	21.325.354.000	-	-	21.376.855.000	21.375.047.444	431.107.196.000	431.105.388.444
501	Provinsi Gorontalo	664.013.123.000	664.013.123.000	69.929.496.000	69.929.496.000	136.771.876.000	136.771.876.000	68.559.806.000	68.559.806.000	-	-	40.595.590.000	40.595.590.000	979.869.891.000	979.869.891.000
502	Kab. Boalemo	294.892.273.000	294.892.273.000	27.930.996.000	27.930.996.000	54.192.782.000	54.192.782.000	37.930.050.000	37.930.050.000	-	-	26.560.658.000	26.560.658.000	441.506.759.000	441.506.759.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAU Block Grant		DAU Specific Grant										Pagu	Realisasi
				Formasi PPPK		Bidang Pendidikan		Bidang Kesehatan		Kelurahan		Bidang Pekerjaan Umum			
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	)=(5)+(7)+(9)+(11)+(13)+(	(18)=(6)+(8)+(10)+(12)+(14)+(16)
503	Kab. Gorontalo	456.778.843.000	456.778.843.000	21.830.124.000	21.830.124.000	81.095.860.000	81.095.860.000	64.087.308.000	64.087.308.000	2.800.000.000	2.800.000.000	34.904.218.000	34.904.218.000	661.496.353.000	661.496.353.000
504	Kota Gorontalo	403.122.330.000	403.122.330.000	14.085.276.000	14.085.276.000	39.787.599.000	39.787.599.000	27.944.377.000	27.944.377.000	10.000.000.000	10.000.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	502.239.582.000	502.239.582.000
505	Kab. Pohuwato	324.632.957.000	324.632.957.000	29.562.576.000	29.562.576.000	56.574.057.000	56.574.057.000	54.829.704.000	54.829.704.000	600.000.000	600.000.000	32.270.813.000	32.270.813.000	498.470.107.000	498.470.107.000
506	Kab. Bone Bolango	346.939.959.000	346.939.959.000	13.127.040.000	13.127.040.000	55.053.767.000	55.053.767.000	44.638.272.000	44.638.272.000	1.000.000.000	1.000.000.000	11.086.450.000	11.086.450.000	471.845.488.000	471.845.488.000
507	Kab. Gorontalo Utara	221.621.424.000	221.621.424.000	62.499.396.000	62.499.396.000	49.624.615.000	49.624.615.000	40.455.930.000	40.455.930.000	-	-	21.883.760.000	21.883.760.000	396.085.125.000	396.085.125.000
508	Provinsi Kepulauan Riau	983.915.657.000	983.915.657.000	48.509.838.000	48.509.838.000	30.981.404.000	30.981.404.000	37.831.659.000	37.831.659.000	-	-	29.943.515.000	29.943.515.000	1.131.182.073.000	1.131.182.073.000
509	Kab. Natuna	287.016.326.000	287.016.326.000	27.938.892.000	27.938.892.000	14.282.271.000	14.282.271.000	36.106.780.000	36.106.780.000	1.400.000.000	1.400.000.000	40.759.582.000	40.759.582.000	407.503.851.000	407.503.851.000
510	Kab. Kepulauan Anambas	270.564.176.000	270.564.176.000	20.055.426.000	20.055.426.000	14.716.656.000	14.716.656.000	29.246.331.000	29.246.331.000	400.000.000	400.000.000	48.908.802.000	48.908.802.000	383.891.391.000	383.891.391.000
511	Kab. Karimun	277.619.259.000	277.619.259.000	49.567.512.000	49.567.512.000	49.494.183.000	49.494.183.000	25.647.350.000	25.647.350.000	5.800.000.000	5.800.000.000	24.499.619.000	24.499.619.000	432.627.923.000	432.627.923.000
512	Kota Batam	537.207.779.000	537.207.779.000	104.771.358.000	104.771.358.000	-	-	28.131.940.000	28.131.940.000	12.800.000.000	12.800.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	690.211.077.000	690.211.077.000
513	Kota Tanjung Pinang	353.560.216.000	353.560.216.000	26.719.512.000	26.719.512.000	47.411.276.000	47.411.276.000	23.839.833.000	23.839.833.000	3.600.000.000	3.600.000.000	9.353.661.000	9.353.661.000	464.484.498.000	464.484.498.000
514	Kab. Lingga	295.137.030.000	295.137.030.000	18.580.734.000	18.580.734.000	36.760.394.000	34.640.327.602	41.624.002.000	33.681.772.130	1.400.000.000	1.400.000.000	77.645.326.000	77.645.326.000	471.147.486.000	461.085.189.732
515	Kab. Bintan	387.281.404.000	387.281.404.000	23.428.536.000	23.428.536.000	19.039.799.000	19.039.799.000	30.789.976.000	30.789.976.000	3.000.000.000	3.000.000.000	30.252.169.000	30.252.169.000	493.791.884.000	493.791.884.000
516	Provinsi Papua Barat	447.670.686.000	447.670.686.000	42.014.005.000	42.014.005.000	24.874.626.000	24.874.626.000	30.303.471.000	30.303.471.000	-	-	101.068.797.000	101.068.797.000	645.931.585.000	645.931.585.000
517	Kab. Fak Fak	501.326.472.000	501.326.472.000	20.404.854.000	20.404.854.000	53.171.344.000	53.171.344.000	51.536.314.000	51.536.314.000	1.400.000.000	1.400.000.000	44.845.954.000	44.845.954.000	672.684.938.000	672.684.938.000
518	Kab. Manokwari	394.629.762.000	394.629.762.000	11.516.190.000	11.516.190.000	55.155.989.000	55.155.989.000	39.258.650.000	39.258.650.000	1.800.000.000	1.799.671.000	31.567.701.000	31.567.701.000	533.928.292.000	533.927.963.000
519	Kab. Sorong	328.065.957.000	328.065.957.000	53.333.676.000	53.333.676.000	47.863.207.000	47.863.207.000	43.905.272.000	43.905.272.000	5.200.000.000	5.200.000.000	51.400.709.000	51.400.709.000	529.768.821.000	529.768.821.000
520	Kota Sorong	399.266.461.000	399.266.461.000	20.635.308.000	20.635.308.000	39.836.208.000	39.836.208.000	36.155.811.000	36.155.811.000	8.200.000.000	8.200.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	511.393.788.000	511.393.788.000
521	Kab. Raja Ampat	372.549.474.000	372.549.474.000	80.609.064.000	80.609.064.000	94.979.966.000	94.979.966.000	58.390.232.000	58.390.232.000	800.000.000	800.000.000	65.436.759.000	65.436.759.000	672.765.495.000	672.765.495.000
522	Kab. Sorong Selatan	273.447.674.000	273.447.674.000	25.852.536.000	25.852.536.000	53.613.983.000	53.613.983.000	32.779.234.000	32.779.234.000	400.000.000	400.000.000	71.723.477.000	71.723.477.000	457.816.904.000	457.816.904.000
523	Kab. Teluk Bintuni	300.163.101.000	300.163.101.000	58.106.466.000	58.106.466.000	43.780.836.000	43.780.836.000	40.261.869.000	40.261.869.000	400.000.000	400.000.000	77.002.144.000	77.002.144.000	519.714.416.000	519.714.416.000
524	Kab. Teluk Wondama	309.447.950.000	309.447.950.000	6.708.048.000	6.708.048.000	48.167.399.000	48.167.399.000	43.999.959.000	43.999.959.000	200.000.000	200.000.000	35.315.504.000	35.315.504.000	443.838.860.000	443.838.860.000
525	Kab. Kaimana	379.044.836.000	379.044.836.000	35.213.412.000	35.213.412.000	86.702.777.000	86.702.777.000	52.613.042.000	52.613.042.000	400.000.000	400.000.000	42.297.862.000	42.297.862.000	596.271.929.000	596.271.929.000
526	Kab. Maybrat	276.486.235.000	276.486.235.000	774.822.000	774.822.000	16.793.342.000	16.793.342.000	32.996.377.000	32.996.377.000	200.000.000	200.000.000	93.798.744.000	93.798.744.000	421.049.520.000	421.049.520.000
527	Kab. Tambrauw	287.826.257.000	287.826.257.000	15.187.308.000	15.187.308.000	49.769.723.000	49.769.723.000	41.153.188.000	41.153.188.000	-	-	89.494.372.000	89.494.372.000	483.430.848.000	483.430.848.000
528	Kab. Manokwari Selatan	237.497.645.000	237.497.645.000	10.159.524.000	10.159.524.000	31.630.001.000	31.630.001.000	27.266.024.000	27.266.024.000	-	-	30.145.494.000	30.145.494.000	336.698.688.000	336.698.688.000
529	Kab. Pegunungan Arfak	215.848.681.000	215.848.681.000	1.825.608.000	1.825.608.000	37.261.747.000	37.261.747.000	23.769.902.000	23.769.902.000	-	-	84.457.642.000	84.457.642.000	363.163.580.000	363.163.580.000
530	Provinsi Sulawesi Barat	726.800.640.000	726.800.640.000	20.294.388.000	20.294.388.000	171.068.672.000	171.068.672.000	76.709.935.000	76.709.935.000	-	-	18.282.187.000	18.282.187.000	1.013.155.822.000	1.013.155.822.000
531	Kab. Majene	336.353.586.000	336.353.586.000	15.033.870.000	15.033.870.000	71.257.396.000	71.257.396.000	58.515.484.000	58.515.484.000	4.000.000.000	4.000.000.000	23.447.516.000	23.447.516.000	508.607.852.000	508.607.852.000
532	Kab. Mamuju	396.993.671.000	396.993.671.000	50.434.842.000	50.434.842.000	88.528.682.000	88.528.682.000	60.590.003.000	60.590.003.000	2.600.000.000	2.600.000.000	22.196.542.000	22.196.542.000	621.343.740.000	621.343.740.000
533	Kab. Polewali Mandar	466.272.658.000	466.272.658.000	37.902.498.000	37.902.498.000	89.912.190.000	89.912.190.000	90.796.816.000	90.796.816.000	4.600.000.000	4.600.000.000	16.295.119.000	16.295.119.000	705.779.281.000	705.779.281.000
534	Kab. Mamasa	329.249.306.000	329.249.306.000	20.471.790.000	20.471.790.000	82.587.955.000	82.587.955.000	35.317.397.000	35.317.397.000	2.600.000.000	2.600.000.000	36.979.639.000	36.979.639.000	507.206.087.000	507.206.087.000
535	Kab. Pasangkayu	313.507.658.000	313.507.658.000	16.319.274.000	16.319.274.000	50.805.946.000	50.805.946.000	44.187.794.000	44.187.794.000	800.000.000	800.000.000	47.731.759.000	47.731.759.000	473.352.431.000	473.352.431.000
536	Kab. Mamuju Tengah	220.919.266.000	220.919.266.000	30.761.124.000	30.761.124.000	46.687.057.000	46.687.057.000	32.881.974.000	32.881.974.000	-	-	18.412.468.000	18.412.468.000	349.661.889.000	349.661.889.000
537	Provinsi Kalimantan Utara	866.691.583.000	866.691.583.000	16.035.576.000	16.035.576.000	76.886.193.000	76.886.193.000	23.575.435.000	23.575.435.000	-	-	133.867.836.000	133.867.836.000	1.117.056.623.000	1.117.056.623.000
538	Provinsi Papua Tengah	406.501.120.000	406.501.120.000	3.284.454.000	3.284.454.000	21.481.784.000	21.481.784.000	31.191.739.000	31.191.739.000	-	-	35.319.323.000	35.319.323.000	497.778.420.000	497.778.420.000
539	Provinsi Papua Selatan	402.871.063.000	402.871.063.000	3.255.124.000	3.255.124.000	21.289.952.000	21.289.952.000	30.913.197.000	30.913.197.000	-	-	35.003.922.000	35.003.922.000	493.333.258.000	493.333.258.000
540	Provinsi Papua Pegunungan	361.887.049.000	361.887.049.000	2.923.981.000	2.923.981.000	19.124.128.000	19.124.128.000	27.768.402.000	27.768.402.000	-	-	31.442.978.000	31.442.978.000	443.146.538.000	443.146.538.000
541	Provinsi Papua Barat Daya	425.031.953.000	425.031.953.000	39.889.355.000	39.889.355.000	23.616.715.000	23.616.715.000	28.771.022.000	28.771.022.000	-	-	95.957.742.000	95.957.742.000	613.266.787.000	613.266.787.000
542	Kab. Bulungan	402.416.413.000	402.416.413.000	20.574.396.000	20.574.396.000	69.131.100.000	69.131.100.000	27.803.722.000	27.803.722.000	1.400.000.000	1.400.000.000	22.864.203.000	22.864.203.000	544.189.834.000	544.189.834.000
543	Kab. Malinau	537.450.551.000	537.450.551.000	35.885.250.000	35.885.250.000	76.991.994.000	76.991.994.000	39.568.072.000	39.568.072.000	-	-	119.574.648.000	119.574.648.000	809.470.515.000	809.470.515.000
544	Kab. Nunukan	374.504.289.000	374.504.289.000	24.757.704.000	24.757.704.000	70.561.608.000	70.561.608.000	35.587.045.000	35.587.045.000	1.600.000.000	1.600.000.000	15.723.536.000	15.723.536.000	522.734.182.000	522.734.182.000
545	Kota Tarakan	370.182.098.000	370.182.098.000	11.022.114.000	11.022.114.000	29.050.898.000	29.050.898.000	17.365.588.000	17.365.588.000	4.000.000.000	4.000.000.000	7.300.000.000	7.300.000.000	438.920.698.000	438.920.698.000
546	Kab. Tana Tidung	296.787.400.000	296.787.400.000	3.852.882.000	3.852.882.000	46.254.342.000	46.254.342.000	21.606.520.000	21.606.520.000	-	-	54.645.946.000	54.645.946.000	423.147.090.000	423.147.090.000
Jumlah		288.929.877.774.000	288.929.877.774.000	25.741.997.004.000	25.741.997.004.000	40.062.746.791.000	39.993.776.407.340	26.031.470.651.000	26.023.518.505.877	1.669.979.718.000	1.644.028.375.953	15.725.967.119.000	15.696.430.527.372	398.162.039.057.000	398.029.628.594.542

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAK FISIK		DAK NONFISIK		HIBAH		Pagu	Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(6)+(8)+(10)	(13)=(7)+(9)+(11)
1	Provinsi Aceh	351.422.617.000	338.647.055.747	779.973.941.000	770.103.574.838	1.591.354.000	1.214.048.550	1.132.987.912.000	1.109.964.679.135
2	Kab. Aceh Barat	57.629.942.000	53.986.632.826	109.564.039.000	107.421.906.583	900.000.000	887.507.653	168.093.981.000	162.296.047.062
3	Kab. Aceh Besar	59.208.327.000	56.816.350.198	185.884.718.000	180.758.823.727	2.197.944.000	230.836.300	247.290.989.000	237.806.010.225
4	Kab. Aceh Selatan	206.333.912.000	203.089.980.815	156.800.919.000	153.817.416.775	1.174.000.000	916.000.000	364.308.831.000	357.823.397.590
5	Kab. Aceh Singkil	49.064.033.000	45.696.428.103	85.700.920.000	85.672.813.240	-	-	134.764.953.000	131.369.241.343
6	Kab. Aceh Tengah	73.081.409.000	72.265.931.600	117.631.439.000	114.409.379.805	576.000.000	570.000.000	191.288.848.000	187.245.311.405
7	Kab. Aceh Tenggara	68.006.903.000	63.902.655.700	129.857.724.000	129.682.370.387	-	-	197.864.627.000	193.585.026.087
8	Kab. Aceh Timur	64.207.246.000	61.260.634.812	208.361.353.000	204.826.272.731	2.427.274.000	2.307.947.608	274.995.873.000	268.394.855.151
9	Kab. Aceh Utara	177.683.610.000	175.141.744.791	347.287.294.000	342.953.177.340	37.513.000	17.134.280	525.008.417.000	518.112.056.411
10	Kab. Bireuen	76.828.945.000	73.875.217.280	210.422.820.000	204.968.506.848	314.642.000	224.163.000	287.566.407.000	279.067.887.128
11	Kab. Pidie	122.036.071.000	119.959.590.971	191.818.674.000	189.962.301.811	300.000.000	300.000.000	314.154.745.000	310.221.892.782
12	Kab. Simeulue	70.490.272.000	62.264.451.263	65.318.429.000	64.079.746.129	-	-	135.808.701.000	126.344.197.392
13	Kota Banda Aceh	46.378.756.000	43.781.961.717	106.851.189.000	106.048.470.752	-	-	153.229.945.000	149.830.432.469
14	Kota Sabang	22.218.272.000	19.836.507.531	33.372.818.000	32.901.831.860	300.000.000	300.000.000	55.891.090.000	53.038.339.391
15	Kota Langsa	54.890.469.000	52.495.159.464	73.817.067.000	73.467.760.353	-	-	128.707.536.000	125.962.919.817
16	Kota Lhokseumawe	23.192.612.000	22.632.985.556	82.063.439.000	81.096.467.226	540.000.000	222.000.000	105.796.051.000	103.951.452.782
17	Kab. Gayo Lues	69.805.748.000	66.917.270.566	57.850.758.000	56.826.406.322	-	-	127.656.506.000	123.743.676.888
18	Kab. Aceh Barat Daya	61.683.472.000	53.908.264.797	78.783.292.000	77.604.211.879	500.000.000	484.500.000	140.966.764.000	131.996.976.676
19	Kab. Aceh Jaya	43.339.064.000	41.167.760.722	68.331.659.000	67.405.938.277	-	-	111.670.723.000	108.573.698.999
20	Kab. Nagan Raya	47.067.442.000	45.800.001.198	89.368.114.000	87.636.465.345	1.750.000.000	963.978.880	138.185.556.000	134.400.445.423
21	Kab. Aceh Tamiang	77.407.661.000	73.322.845.016	141.213.792.000	139.145.675.134	6.300.000.000	6.300.000.000	224.921.453.000	218.768.520.150
22	Kab. Bener Meriah	57.145.189.000	55.642.713.214	91.568.627.000	90.706.382.550	-	-	148.713.816.000	146.349.095.764
23	Kab. Pidie Jaya	50.197.121.000	49.347.130.631	82.995.873.000	82.687.279.100	-	-	133.192.994.000	132.034.409.731
24	Kota Subulussalam	39.727.032.000	39.180.253.160	60.054.390.000	59.307.539.746	-	-	99.781.422.000	98.487.792.906
25	Provinsi Sumatera Utara	427.465.166.000	406.604.190.383	1.799.681.061.000	1.743.051.869.304	72.664.411.000	65.913.215.833	2.299.810.638.000	2.215.569.275.520
26	Kab. Asahan	98.371.825.000	97.300.890.613	244.845.290.000	239.380.277.065	42.723.000	4.404.000	343.259.838.000	336.685.571.678
27	Kab. Dairi	107.025.256.000	97.765.061.442	175.510.160.000	174.906.544.116	-	-	282.535.416.000	272.671.605.558
28	Kab. Deli Serdang	38.657.898.000	37.502.068.560	603.211.687.000	581.587.042.066	-	-	641.869.585.000	619.089.110.626
29	Kab. Karo	106.810.989.000	100.719.686.844	181.984.145.000	174.085.193.380	-	-	288.795.134.000	274.804.880.224
30	Kab. Labuhanbatu	98.427.974.000	96.847.341.054	178.995.592.000	176.092.788.690	-	-	277.423.566.000	272.940.129.744
31	Kab. Langkat	50.175.477.000	48.292.510.754	392.188.193.000	381.000.912.839	-	-	442.363.670.000	429.293.423.593
32	Kab. Mandailing Natal	90.210.036.000	83.765.629.121	282.290.851.000	282.029.061.050	-	-	372.500.887.000	365.794.690.171
33	Kab. Nias	112.193.782.000	104.923.397.190	110.218.631.000	109.536.810.209	-	-	222.412.413.000	214.460.207.399
34	Kab. Simalungun	82.200.360.000	76.086.729.456	356.499.443.000	339.186.046.344	19.668.052.000	18.668.029.548	458.367.855.000	433.940.805.348
35	Kab. Tapanuli Selatan	118.195.364.000	114.160.422.278	152.675.046.000	145.573.503.106	-	-	270.870.410.000	259.733.925.384
36	Kab. Tapanuli Tengah	64.371.796.000	62.700.850.461	174.437.694.000	171.818.030.921	270.279.000	-	239.079.769.000	234.518.881.382
37	Kab. Tapanuli Utara	109.500.895.000	103.496.236.437	186.739.259.000	184.862.295.824	-	-	296.240.154.000	288.358.532.261
38	Kab. Toba Samosir	124.878.028.000	117.410.337.188	137.535.025.000	133.085.398.786	-	-	262.413.053.000	250.495.735.974
39	Kota Binjai	34.625.662.000	32.867.999.580	123.334.128.000	122.903.084.289	-	-	157.959.790.000	155.771.083.869
40	Kota Medan	40.670.530.000	38.650.129.380	549.606.096.000	539.817.205.889	-	-	590.276.626.000	578.467.335.269
41	Kota Pematang Siantar	17.152.768.000	15.752.927.984	118.424.952.000	116.334.625.883	1.500.000.000	894.000.000	137.077.720.000	132.981.553.867
42	Kota Sibolga	15.842.959.000	14.878.158.026	48.597.859.000	48.502.291.838	-	-	64.440.818.000	63.380.449.864
43	Kota Tanjung Balai	31.721.128.000	30.804.146.082	68.359.084.000	62.788.753.620	-	-	100.080.212.000	93.592.899.702
44	Kota Tebing Tinggi	26.329.737.000	22.791.104.136	78.917.379.000	76.744.944.526	-	-	105.247.116.000	99.536.048.662
45	Kota Padang Sidempuan	30.602.944.000	29.946.821.196	102.777.645.000	100.612.170.875	-	-	133.380.589.000	130.558.992.071
46	Kab. Pakpak Bharat	61.204.908.000	57.344.549.417	43.770.159.000	40.775.354.620	-	-	104.975.067.000	98.119.904.037
47	Kab. Nias Selatan	157.205.086.000	152.927.148.799	213.520.090.000	210.826.662.194	-	-	370.725.176.000	363.753.810.993
48	Kab. Humbang Hasundutan	91.407.368.000	85.099.858.042	133.492.530.000	128.594.423.998	22.933.859.000	22.342.974.255	247.833.757.000	236.037.256.295

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAK FISIK		DAK NONFISIK		HIBAH		Pagu	Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(6)+(8)+(10)	(13)=(7)+(9)+(11)
49	Kab. Serdang Bedagai	187.721.702.000	184.320.758.903	239.595.536.000	234.773.077.484	-	-	427.317.238.000	419.093.836.387
50	Kab. Samosir	122.775.106.000	97.090.526.323	104.399.784.000	102.758.231.870	-	-	227.174.890.000	199.848.758.193
51	Kab. Batu Bara	107.230.537.000	102.282.477.703	171.652.561.000	170.921.061.120	-	-	278.883.098.000	273.203.538.823
52	Kab. Padang Lawas	51.149.952.000	50.422.562.814	144.724.043.000	143.466.891.202	-	-	195.873.995.000	193.889.454.016
53	Kab. Padang Lawas Utara	54.570.525.000	52.885.321.616	144.554.556.000	142.610.630.226	-	-	199.125.081.000	195.495.951.842
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	61.605.213.000	58.496.087.353	121.398.718.000	114.003.813.514	-	-	183.003.931.000	172.499.900.867
55	Kab. Labuhanbatu Utara	63.957.790.000	63.494.386.739	165.904.572.000	160.643.578.839	-	-	229.862.362.000	224.137.965.578
56	Kab. Nias Utara	227.849.740.000	221.305.660.063	108.461.992.000	107.600.920.184	-	-	336.311.732.000	328.906.580.247
57	Kab. Nias Barat	103.903.103.000	97.920.409.279	134.999.607.000	134.429.497.674	-	-	238.902.710.000	232.349.906.953
58	Kota Gunungsitoli	64.644.298.000	63.956.240.394	82.102.779.000	81.076.900.467	-	-	146.747.077.000	145.033.140.861
59	Provinsi Sumatera Barat	387.377.756.000	365.925.325.993	907.055.911.000	887.753.851.106	454.460.000	99.091.500	1.294.888.127.000	1.253.778.268.599
60	Kab. Lima Puluh Kota	39.257.731.000	38.742.529.210	224.641.670.000	220.253.273.745	3.901.187.000	3.080.099.400	267.800.588.000	262.075.902.355
61	Kab. Agam	50.590.270.000	47.863.369.762	258.608.279.000	250.556.537.945	4.500.000.000	3.654.000.000	313.698.549.000	302.073.907.707
62	Kab. Kepulauan Mentawai	106.880.270.000	89.054.044.924	88.818.167.000	84.448.879.680	-	-	195.698.437.000	173.502.924.604
63	Kab. Padang Pariaman	98.261.322.000	87.426.804.427	240.271.501.000	240.234.485.805	500.000.000	445.291.000	339.032.823.000	328.106.581.232
64	Kab. Pasaman	109.689.147.000	101.542.239.884	162.058.772.000	158.827.340.503	6.400.000.000	3.544.000.000	278.147.919.000	263.913.580.387
65	Kab. Pesisir Selatan	137.684.514.000	131.881.908.033	269.669.090.000	263.679.344.034	9.888.440.000	7.663.518.580	417.242.044.000	403.224.770.647
66	Kab. Sijunjung	64.050.902.000	58.253.320.626	139.414.443.000	136.668.551.512	2.018.091.000	1.683.119.000	205.483.436.000	196.604.991.138
67	Kab. Solok	87.282.593.000	79.481.643.058	220.473.345.000	219.874.948.421	4.628.000.000	1.184.000.000	312.383.938.000	300.540.591.479
68	Kab. Tanah Datar	90.306.278.000	86.100.318.154	195.859.475.000	189.460.986.853	3.320.000.000	3.157.882.000	289.485.753.000	278.719.187.007
69	Kota Bukit Tinggi	13.404.454.000	12.315.114.685	67.606.075.000	66.772.606.283	-	-	81.010.529.000	79.087.720.968
70	Kota Padang Panjang	5.329.305.000	4.580.717.464	37.100.924.000	36.045.472.969	-	-	42.430.229.000	40.626.190.433
71	Kota Padang	18.030.941.000	16.508.320.521	327.352.543.000	320.034.456.648	3.528.000.000	2.403.000.000	348.911.484.000	338.945.777.169
72	Kota Payakumbuh	18.740.763.000	16.755.427.452	80.289.062.000	79.834.984.936	1.800.000.000	1.800.000.000	100.829.825.000	98.390.412.388
73	Kota Sawahlunto	54.035.717.000	50.548.393.204	53.400.093.000	52.320.788.084	-	-	107.435.810.000	102.869.181.288
74	Kota Solok	11.462.704.000	10.732.648.707	47.936.318.000	47.040.886.960	1.164.000.000	918.000.000	60.563.022.000	58.691.535.667
75	Kota Pariaman	32.358.895.000	30.681.315.075	63.004.382.000	62.073.158.339	6.000.000.000	1.272.000.000	101.363.277.000	94.026.473.414
76	Kab. Pasaman Barat	34.883.925.000	26.779.297.620	199.879.457.000	188.907.295.039	1.656.816.000	1.549.569.363	236.420.198.000	217.236.162.022
77	Kab. Dharmasraya	60.367.314.000	58.171.037.299	128.187.412.000	127.291.059.981	3.100.000.000	1.924.000.000	191.654.726.000	187.386.097.280
78	Kab. Solok Selatan	44.582.272.000	42.530.454.207	110.208.561.000	107.142.406.614	-	-	154.790.833.000	149.672.860.821
79	Provinsi Riau	303.091.172.000	295.138.574.452	761.964.490.000	750.507.837.352	-	-	1.065.055.662.000	1.045.646.411.804
80	Kab. Bengkalis	68.515.492.000	67.083.395.782	256.433.778.000	254.060.055.947	-	-	324.949.270.000	321.143.451.729
81	Kab. Indragiri Hilir	91.708.535.000	53.416.611.274	279.740.405.000	277.250.348.304	-	-	371.448.940.000	330.666.959.578
82	Kab. Indragiri Hulu	43.605.456.000	41.885.411.434	197.976.635.000	194.636.965.509	-	-	241.582.091.000	236.522.376.943
83	Kab. Kampar	29.493.099.000	28.407.335.549	368.811.053.000	357.551.543.486	2.100.000.000	2.100.000.000	400.404.152.000	388.058.879.035
84	Kab. Kuantan Singingi	37.851.524.000	37.162.291.831	174.357.513.000	165.169.057.773	-	-	212.209.037.000	202.331.349.604
85	Kab. Pelalawan	47.753.463.000	43.314.780.278	183.784.898.000	173.802.488.525	500.000.000	238.000.000	232.038.361.000	217.355.268.803
86	Kab. Rokan Hilir	94.432.788.000	91.154.072.354	270.793.237.000	269.039.912.091	600.000.000	312.973.395	365.826.025.000	360.506.957.840
87	Kab. Rokan Hulu	60.313.404.000	58.208.064.851	241.593.269.000	237.816.744.097	-	-	301.906.673.000	296.024.808.948
88	Kab. Siak	33.499.919.000	31.824.443.977	207.834.740.000	205.064.916.696	-	-	241.334.659.000	236.889.360.673
89	Kota Dumai	48.143.530.000	47.075.071.699	133.931.625.000	131.896.126.535	-	-	182.075.155.000	178.971.198.234
90	Kota Pekanbaru	33.387.348.000	32.786.713.679	319.576.810.000	313.908.195.065	-	-	352.964.158.000	346.694.908.744
91	Kab. Kepulauan Meranti	79.759.063.000	79.250.197.369	109.568.558.000	109.278.208.100	-	-	189.327.621.000	188.528.405.469
92	Provinsi Jambi	348.802.566.000	340.552.290.077	415.268.769.000	407.631.235.919	31.802.922.000	27.815.501.472	795.874.257.000	775.999.027.468
93	Kab. Batanghari	110.877.258.000	108.043.229.303	138.530.555.000	138.467.348.923	3.000.000.000	3.000.000.000	252.407.813.000	249.510.578.226
94	Kab. Bungo	61.177.817.000	57.923.375.299	144.426.376.000	142.165.585.694	9.330.000.000	8.184.000.000	214.934.193.000	208.272.960.993
95	Kab. Kerinci	116.825.085.000	112.627.365.092	144.732.852.000	140.940.259.450	3.000.000.000	1.587.000.000	264.557.937.000	255.154.624.542
96	Kab. Merangin	72.918.241.000	71.494.372.292	177.007.168.000	173.205.878.281	3.000.000.000	3.000.000.000	252.925.409.000	247.700.250.573
97	Kab. Muaro Jambi	67.555.290.000	64.792.709.333	176.485.710.000	174.962.213.038	-	-	244.041.000.000	239.754.922.371
98	Kab. Sarolangun	47.429.459.000	46.855.505.392	135.624.272.000	134.648.117.552	-	-	183.053.731.000	181.503.622.944

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAK FISIK		DAK NONFISIK		HIBAH		Pagu	Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(6)+(8)+(10)	(13)=(7)+(9)+(11)
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	41.637.990.000	40.889.963.150	136.265.994.000	135.567.010.711	-	-	177.903.984.000	176.456.973.861
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	125.894.658.000	121.474.955.418	119.589.459.000	117.007.706.726	-	-	245.484.117.000	238.482.662.144
101	Kab. Tebo	36.169.036.000	35.400.776.583	140.647.007.000	140.383.463.435	16.494.000.000	13.722.176.810	193.310.043.000	189.506.416.828
102	Kota Jambi	47.770.850.000	46.258.109.474	186.860.806.000	181.596.739.254	-	-	234.631.656.000	227.854.848.728
103	Kota Sungai Penuh	41.606.645.000	41.081.776.282	62.612.725.000	61.396.145.575	-	-	104.219.370.000	102.477.921.857
104	Provinsi Sumatera Selatan	276.358.935.000	261.641.344.656	903.471.628.000	899.680.733.318	305.795.000	139.433.676	1.180.136.358.000	1.161.461.511.650
105	Kab. Lahat	42.078.853.000	41.876.989.755	191.513.075.000	187.411.004.479	654.667.000	68.300.000	234.246.595.000	229.356.294.234
106	Kab. Musi Banyuasin	76.212.283.000	74.851.861.250	280.414.477.000	277.469.901.400	1.800.000.000	1.800.000.000	358.426.760.000	354.121.762.650
107	Kab. Musi Rawas	40.645.945.000	39.909.751.985	173.133.350.000	169.070.744.050	-	-	213.779.295.000	208.980.496.035
108	Kab. Muara Enim	42.851.354.000	39.649.991.641	237.334.035.000	230.522.846.173	3.397.136.000	2.403.998.090	283.582.525.000	272.576.835.904
109	Kab. Ogan Komering Ilir	137.806.890.000	134.680.501.080	327.422.814.000	324.958.820.736	-	-	465.229.704.000	459.639.321.816
110	Kab. Ogan Komering Ulu	36.551.605.000	30.745.624.717	157.089.599.000	156.764.366.745	-	-	193.641.204.000	187.509.991.462
111	Kota Palembang	76.669.341.000	74.457.669.075	458.672.481.000	456.145.173.454	99.650.813.000	90.440.811.006	634.992.635.000	621.043.653.535
112	Kota Prabumulih	32.785.850.000	30.966.215.433	89.558.448.000	87.883.263.462	-	-	122.344.298.000	118.849.478.895
113	Kota Pagar Alam	63.048.034.000	57.759.530.766	65.924.542.000	64.987.356.983	-	-	128.972.576.000	122.746.887.749
114	Kota Lubuk Linggau	24.842.401.000	23.767.652.185	99.772.427.000	99.657.618.693	-	-	124.614.828.000	123.425.270.878
115	Kab. Banyuasin	125.520.549.000	124.483.894.988	339.168.619.000	337.339.810.747	3.072.949.000	3.041.177.000	467.762.117.000	464.864.882.735
116	Kab. Ogan Ilir	106.337.827.000	103.123.213.253	202.208.560.000	196.960.303.205	900.000.000	900.000.000	309.446.387.000	300.983.516.458
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	118.863.731.000	114.963.724.429	250.812.094.000	246.593.514.246	4.844.000.000	3.108.000.000	374.519.825.000	364.665.238.675
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	87.707.363.000	83.854.521.898	137.482.596.000	133.802.245.261	4.502.440.000	4.280.000.000	229.692.399.000	221.936.767.159
119	Kab. Empat Lawang	133.565.262.000	131.003.161.391	99.103.868.000	98.505.775.550	4.168.375.000	1.654.375.000	236.837.505.000	231.163.311.941
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	14.927.851.000	14.862.868.151	81.631.761.000	79.086.283.029	-	-	96.559.612.000	93.949.151.180
121	Kab. Musi Rawas Utara	131.582.291.000	129.661.203.003	77.256.499.000	75.989.882.686	-	-	208.838.790.000	205.651.085.689
122	Provinsi Bengkulu	281.760.385.000	268.641.168.385	300.116.793.000	299.192.132.322	-	-	581.877.178.000	567.833.300.707
123	Kab. Bengkulu Selatan	61.401.419.000	60.037.369.176	109.645.688.000	109.150.485.776	-	-	171.047.107.000	169.187.854.952
124	Kab. Bengkulu Utara	69.998.869.000	69.031.320.039	165.187.879.000	162.842.870.059	2.220.000.000	2.220.000.000	237.406.748.000	234.094.190.098
125	Kab. Rejang Lebong	42.640.644.000	40.836.411.238	141.657.436.000	138.173.614.674	3.200.000.000	2.874.000.000	187.498.080.000	181.884.025.912
126	Kota Bengkulu	44.419.877.000	42.196.681.975	157.778.735.000	154.096.593.756	1.800.000.000	1.749.000.000	203.998.612.000	198.042.275.731
127	Kab. Kaur	99.350.019.000	96.058.269.892	87.345.602.000	84.541.029.300	900.000.000	-	187.595.621.000	180.599.299.192
128	Kab. Seluma	84.228.546.000	82.008.850.415	118.287.078.000	116.916.368.460	-	-	202.515.624.000	198.925.218.875
129	Kab. Mukomuko	105.839.130.000	102.710.002.019	107.131.969.000	103.458.365.026	-	-	212.971.099.000	206.168.367.045
130	Kab. Lebong	28.712.986.000	28.403.761.147	64.277.718.000	63.463.457.121	-	-	92.990.704.000	91.867.218.268
131	Kab. Kepahiang	38.286.034.000	37.307.625.900	76.966.286.000	76.684.465.278	-	-	115.252.320.000	113.992.091.178
132	Kab. Bengkulu Tengah	39.216.527.000	38.289.615.441	87.262.319.000	86.379.898.753	-	-	126.478.846.000	124.669.514.194
133	Provinsi Lampung	291.760.113.000	280.285.026.271	848.922.606.000	829.778.252.949	815.442.000	285.632.000	1.141.498.161.000	1.110.348.911.220
134	Kab. Lampung Barat	54.384.361.000	54.035.898.900	143.631.102.000	142.752.536.261	-	-	198.015.463.000	196.788.435.161
135	Kab. Lampung Selatan	103.313.643.000	101.167.894.249	352.944.611.000	345.343.487.793	960.000.000	300.000.000	457.218.254.000	446.811.382.042
136	Kab. Lampung Tengah	105.490.730.000	101.281.032.637	457.302.214.000	450.234.553.801	3.456.647.000	2.947.275.000	566.249.591.000	554.462.861.438
137	Kab. Lampung Utara	62.096.268.000	54.660.591.525	246.850.687.000	238.723.533.197	-	-	308.946.955.000	293.384.124.722
138	Kab. Lampung Timur	63.294.368.000	61.763.625.193	359.456.547.000	352.389.220.111	-	-	422.750.915.000	414.152.845.304
139	Kab. Tanggamus	56.969.805.000	54.939.901.656	250.330.517.000	245.770.672.585	1.250.000.000	105.625.000	308.550.322.000	300.816.199.241
140	Kab. Tulang Bawang	139.806.471.000	137.421.025.275	177.425.507.000	176.166.518.615	939.984.000	20.478.000	318.171.962.000	313.608.021.890
141	Kab. Way Kanan	76.481.455.000	75.839.869.755	214.503.678.000	213.251.521.152	-	-	290.985.133.000	289.091.390.907
142	Kota Bandar Lampung	40.036.963.000	39.502.740.170	307.988.440.000	302.817.504.524	-	-	348.025.403.000	342.320.244.694
143	Kota Metro	22.130.113.000	19.092.825.212	91.061.388.000	90.779.036.813	-	-	113.191.501.000	109.871.862.025
144	Kab. Pesawaran	58.042.740.000	57.052.805.800	192.107.703.000	189.627.885.512	967.670.000	130.559.000	251.118.113.000	246.811.250.312
145	Kab. Pringsewu	35.261.419.000	35.068.932.800	188.345.299.000	187.144.972.096	1.500.000.000	-	225.106.718.000	222.213.904.896
146	Kab. Mesuji	46.949.158.000	45.721.319.860	102.120.266.000	100.794.305.750	101.744.000	12.015.000	149.171.168.000	146.527.640.610
147	Kab. Tulang Bawang Barat	41.662.595.000	41.128.405.736	128.018.385.000	123.432.195.392	-	-	169.680.980.000	164.560.601.128
148	Kab. Pesisir Barat	34.671.829.000	34.442.480.050	86.607.753.000	86.294.386.100	-	-	121.279.582.000	120.736.866.150

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAK FISIK		DAK NONFISIK		HIBAH		Pagu	Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(6)+(8)+(10)	(13)=(7)+(9)+(11)
149	Provinsi DKI Jakarta	4.168.977.000	3.076.020.400	3.138.470.026.000	3.055.368.539.005	1.984.457.561.000	1.735.248.701.390	5.127.096.564.000	4.793.693.260.795
150	Provinsi Jawa Barat	577.847.874.000	529.067.682.239	4.459.553.533.000	4.430.320.269.948	7.752.000	-	5.037.409.159.000	4.959.387.952.187
151	Kab. Bandung	256.518.497.000	234.603.206.934	1.011.756.703.000	996.408.822.164	6.069.000.000	1.721.792.636	1.274.344.200.000	1.232.733.821.734
152	Kab. Bekasi	81.846.167.000	80.828.296.035	807.255.036.000	789.461.835.709	-	-	889.101.203.000	870.290.131.744
153	Kab. Bogor	86.193.073.000	80.883.555.075	1.477.269.250.000	1.461.341.331.947	-	-	1.563.462.323.000	1.542.224.887.022
154	Kab. Ciamis	92.965.794.000	89.197.596.137	418.778.830.000	412.359.456.152	4.935.558.000	3.923.520.000	516.680.182.000	505.480.572.289
155	Kab. Cianjur	110.481.043.000	105.221.285.020	795.194.178.000	789.142.836.350	4.800.000.000	4.800.000.000	910.475.221.000	899.164.121.370
156	Kab. Cirebon	106.738.661.000	99.852.769.780	689.356.864.000	688.701.256.872	-	-	796.095.525.000	788.554.026.652
157	Kab. Garut	169.160.992.000	151.231.325.937	899.887.125.000	896.740.233.131	20.557.890.000	10.507.849.500	1.089.606.007.000	1.058.479.408.568
158	Kab. Indramayu	120.993.040.000	112.869.791.887	534.800.407.000	520.658.866.149	30.271.020.000	30.269.653.900	686.064.467.000	663.798.311.936
159	Kab. Karawang	99.928.209.000	94.974.879.597	669.402.746.000	651.549.495.477	9.530.000.000	8.256.000.000	778.860.955.000	754.780.375.074
160	Kab. Kuningan	91.389.992.000	90.399.118.635	475.823.847.000	475.035.860.841	6.000.000.000	5.287.120.850	573.213.839.000	570.722.100.326
161	Kab. Majalengka	76.550.817.000	72.213.705.353	452.614.537.000	451.274.075.240	600.191.000	156.125.500	529.765.545.000	523.643.906.093
162	Kab. Purwakarta	75.844.723.000	73.622.178.458	332.123.688.000	328.971.230.634	-	-	407.968.411.000	402.593.409.092
163	Kab. Subang	118.857.735.000	115.305.969.003	533.715.260.000	522.337.590.893	24.603.300.000	15.604.160.000	677.176.295.000	653.247.719.896
164	Kab. Sukabumi	200.647.903.000	188.955.880.580	730.559.998.000	724.660.959.426	13.584.453.000	10.390.996.000	944.792.354.000	924.007.836.006
165	Kab. Sumedang	87.351.033.000	81.093.831.761	450.358.229.000	446.181.728.958	3.587.151.000	537.133.033	541.296.413.000	527.812.693.752
166	Kab. Tasikmalaya	145.781.599.000	135.153.932.017	614.835.357.000	610.523.675.142	11.342.000.000	9.064.020.350	771.958.956.000	754.741.627.509
167	Kota Bandung	59.845.231.000	54.942.069.096	658.203.469.000	645.146.757.167	-	-	718.048.700.000	700.088.826.263
168	Kota Bekasi	39.998.376.000	34.243.980.406	594.721.338.000	575.104.521.516	-	-	634.719.714.000	609.348.501.922
169	Kota Bogor	57.651.695.000	55.796.999.805	302.337.399.000	298.780.741.220	-	-	359.989.094.000	354.577.741.025
170	Kota Cirebon	27.036.057.000	25.648.122.847	147.004.172.000	144.386.762.200	2.240.946.000	2.130.000.000	176.281.175.000	172.164.885.047
171	Kota Depok	57.459.351.000	27.984.140.767	437.105.657.000	433.507.068.335	-	-	494.565.008.000	461.491.209.102
172	Kota Sukabumi	21.258.410.000	15.787.902.529	124.081.414.000	121.812.589.023	1.500.000.000	1.500.000.000	146.839.824.000	139.100.491.552
173	Kota Tasikmalaya	38.493.051.000	35.812.567.200	247.817.083.000	245.408.922.723	-	-	286.310.134.000	281.221.489.923
174	Kota Cimahi	14.085.517.000	13.481.150.654	168.163.507.000	162.921.675.972	-	-	182.249.024.000	176.402.826.626
175	Kota Banjar	17.173.258.000	14.178.780.272	84.147.160.000	83.594.830.049	-	-	101.320.418.000	97.773.610.321
176	Kab. Bandung Barat	93.129.421.000	86.206.280.440	490.974.674.000	490.478.446.782	-	-	584.104.095.000	576.684.727.222
177	Kab. Pangandaran	35.911.020.000	33.845.756.074	147.958.246.000	146.471.158.926	-	-	183.869.266.000	180.316.915.000
178	Provinsi Jawa Tengah	426.632.402.000	404.100.292.842	3.318.002.184.000	3.296.494.807.319	56.556.782.000	54.495.623.308	3.801.191.368.000	3.755.090.723.469
179	Kab. Banjarnegara	61.448.427.000	52.327.289.494	330.132.521.000	326.006.566.573	22.020.813.000	19.346.236.536	413.601.761.000	397.680.092.603
180	Kab. Banyumas	95.778.148.000	86.965.470.307	552.884.332.000	546.039.008.173	12.365.094.000	10.997.012.968	661.027.574.000	644.001.491.448
181	Kab. Batang	44.617.810.000	38.041.262.565	261.763.912.000	257.591.723.693	500.000.000	500.000.000	306.881.722.000	296.132.986.258
182	Kab. Blora	121.265.649.000	116.008.152.256	311.440.659.000	308.828.323.248	-	-	432.706.308.000	424.836.475.504
183	Kab. Boyolali	91.670.742.000	89.455.272.025	318.299.894.000	317.632.815.839	5.240.000.000	5.224.000.000	415.210.636.000	412.312.087.864
184	Kab. Brebes	114.585.382.000	108.573.506.917	509.362.584.000	506.251.252.584	15.955.581.000	14.553.262.500	639.903.547.000	629.378.022.001
185	Kab. Cilacap	143.529.951.000	120.890.096.969	555.321.828.000	552.989.625.790	23.625.631.000	23.309.328.200	722.477.410.000	697.189.050.959
186	Kab. Demak	70.245.900.000	67.798.319.975	352.846.559.000	345.019.542.866	13.480.000.000	10.410.000.000	436.572.459.000	423.227.862.841
187	Kab. Grobogan	97.172.585.000	92.495.894.311	418.317.142.000	417.727.841.381	7.234.000.000	5.950.000.000	522.723.727.000	516.173.735.692
188	Kab. Jepara	95.996.101.000	88.144.036.053	337.678.217.000	334.823.843.516	4.700.000.000	4.694.000.000	438.374.318.000	427.661.879.569
189	Kab. Karanganyar	115.077.129.000	104.072.462.190	340.564.255.000	338.173.564.192	7.210.000.000	6.650.000.000	462.851.384.000	448.896.026.382
190	Kab. Kebumen	52.506.964.000	49.510.073.990	462.590.014.000	460.729.109.898	1.912.083.000	1.520.109.562	517.009.061.000	511.759.293.450
191	Kab. Kendal	97.253.126.000	92.695.230.088	358.035.525.000	357.993.514.361	8.000.000.000	8.000.000.000	463.288.651.000	458.688.744.449
192	Kab. Klaten	65.510.623.000	63.086.397.870	390.115.032.000	385.717.744.993	1.200.000.000	1.200.000.000	456.825.655.000	450.004.142.863
193	Kab. Kudus	65.553.887.000	62.199.199.163	257.399.074.000	251.091.438.966	2.700.000.000	1.236.000.000	325.652.961.000	314.526.638.129
194	Kab. Magelang	107.368.157.000	102.749.475.887	354.868.934.000	353.949.984.267	21.497.000.000	18.454.635.298	483.734.091.000	475.154.095.452
195	Kab. Pati	97.631.191.000	90.256.974.731	387.201.618.000	386.246.647.087	1.507.167.000	1.487.221.845	486.339.976.000	477.990.843.663
196	Kab. Pekalongan	112.670.944.000	110.610.427.845	308.240.108.000	304.947.802.801	7.520.000.000	7.100.000.000	428.431.052.000	422.658.230.646
197	Kab. Pemalang	114.678.930.000	91.392.948.645	452.729.623.000	451.281.708.103	-	-	567.408.553.000	542.674.656.748
198	Kab. Purbalingga	78.101.871.000	70.069.270.422	334.291.916.000	331.370.459.891	10.810.000.000	10.123.664.184	423.203.787.000	411.563.394.497

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAK FISIK		DAK NONFISIK		HIBAH		Pagu	Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(6)+(8)+(10)	(13)=(7)+(9)+(11)
199	Kab. Purworejo	51.901.030.000	48.952.081.524	290.798.381.000	286.481.446.539	1.834.497.000	1.645.020.161	344.533.908.000	337.078.548.224
200	Kab. Rembang	137.338.085.000	122.522.193.546	234.058.609.000	232.105.615.789	2.000.000.000	1.994.000.000	373.396.694.000	356.621.809.335
201	Kab. Semarang	101.678.722.000	91.253.545.969	340.300.799.000	340.275.828.819	-	-	441.979.521.000	431.529.374.788
202	Kab. Sragen	58.903.116.000	54.716.830.323	336.334.962.000	335.579.769.809	4.930.000.000	4.238.000.000	400.168.078.000	394.534.600.132
203	Kab. Sukoharjo	44.159.564.000	37.793.943.810	276.570.941.000	275.911.571.737	3.239.395.000	1.655.395.000	323.969.900.000	315.360.910.547
204	Kab. Tegal	85.966.274.000	74.468.758.496	455.402.182.000	454.725.693.477	9.569.181.000	9.457.995.000	550.937.637.000	538.652.446.973
205	Kab. Temanggung	118.890.309.000	109.544.079.906	280.251.746.000	277.372.507.081	-	-	399.142.055.000	386.916.586.987
206	Kab. Wonogiri	154.857.396.000	143.768.981.848	394.685.176.000	393.800.994.865	1.500.000.000	1.500.000.000	551.042.572.000	539.069.976.713
207	Kab. Wonosobo	168.174.552.000	161.079.696.095	311.877.871.000	308.181.144.140	51.992.112.000	48.671.356.930	532.044.535.000	517.932.197.165
208	Kota Magelang	37.379.690.000	35.795.497.981	71.675.312.000	70.583.860.840	1.992.203.000	1.992.203.000	111.047.205.000	108.371.561.821
209	Kota Pekalongan	53.149.560.000	52.410.414.846	112.131.307.000	111.663.146.683	2.250.000.000	1.788.000.000	167.530.867.000	165.861.561.529
210	Kota Salatiga	25.759.777.000	23.286.747.059	84.194.739.000	83.211.231.456	-	-	109.954.516.000	106.497.978.515
211	Kota Semarang	80.795.861.000	66.329.848.159	436.461.443.000	434.498.277.036	-	-	517.257.304.000	500.828.125.195
212	Kota Surakarta	19.659.711.000	16.412.444.897	218.610.912.000	214.380.225.977	900.000.000	900.000.000	239.170.623.000	231.692.670.874
213	Kota Tegal	25.176.077.000	22.617.077.830	110.213.691.000	109.029.013.623	-	-	135.389.768.000	131.646.091.453
214	Provinsi DI Yogyakarta	147.518.081.000	134.151.614.382	511.869.262.000	502.022.052.490	-	-	659.387.343.000	636.173.666.872
215	Kab. Bantul	59.502.244.000	56.576.626.350	317.404.900.000	313.847.281.469	7.080.000.000	7.080.000.000	383.987.144.000	377.503.907.819
216	Kab. Gunung Kidul	82.041.664.000	74.024.339.759	317.325.875.000	315.554.286.634	5.980.000.000	5.974.000.000	405.347.539.000	395.552.626.393
217	Kab. Kulon Progo	88.074.029.000	83.812.884.604	214.664.089.000	213.906.235.561	8.000.000.000	8.000.000.000	310.738.118.000	305.719.120.165
218	Kab. Sleman	24.498.261.000	23.251.738.208	349.904.371.000	348.681.946.640	12.156.418.000	9.524.649.805	386.559.050.000	381.458.334.653
219	Kota Yogyakarta	14.727.095.000	13.825.807.247	159.915.440.000	158.653.692.760	-	-	174.642.535.000	172.479.500.007
220	Provinsi Jawa Timur	540.992.405.000	524.847.542.564	3.691.608.374.000	3.634.393.490.409	32.415.000	-	4.232.633.194.000	4.159.241.032.973
221	Kab. Bangkalan	51.374.485.000	49.979.019.188	350.021.041.000	340.997.612.506	-	-	401.395.526.000	390.976.631.694
222	Kab. Banyuwangi	105.902.983.000	88.271.742.193	460.142.586.000	455.751.097.821	8.405.000.000	7.822.476.000	574.450.569.000	551.845.316.014
223	Kab. Blitar	66.732.394.000	65.170.825.017	343.078.877.000	342.684.070.013	-	-	409.811.271.000	407.854.895.030
224	Kab. Bojonegoro	34.257.391.000	31.486.932.421	362.723.136.000	355.597.180.668	-	-	396.980.527.000	387.084.113.089
225	Kab. Bondowoso	110.709.780.000	100.481.994.423	263.543.590.000	254.107.295.015	-	-	374.253.370.000	354.589.289.438
226	Kab. Gresik	130.356.414.000	122.396.553.183	348.440.790.000	348.227.442.293	7.800.000.000	3.890.000.000	486.597.204.000	474.513.995.476
227	Kab. Jember	49.843.643.000	45.036.717.101	588.545.521.000	581.366.922.328	1.092.303.000	936.104.334	639.481.467.000	627.339.743.763
228	Kab. Jombang	64.357.592.000	58.893.045.011	365.239.718.000	364.080.728.993	542.658.000	-	430.139.968.000	422.973.774.004
229	Kab. Kediri	57.851.961.000	50.252.906.793	448.386.753.000	436.407.268.605	3.156.381.000	721.452.668	509.395.095.000	487.381.628.066
230	Kab. Lamongan	128.497.688.000	125.254.014.967	370.177.284.000	367.204.738.220	3.799.228.000	1.410.368.400	502.474.200.000	493.869.121.587
231	Kab. Lumajang	67.213.122.000	60.316.911.291	310.130.635.000	302.652.220.534	3.790.793.000	3.103.656.870	381.134.550.000	366.072.788.695
232	Kab. Madiun	71.982.004.000	66.957.817.039	232.878.596.000	228.386.827.185	6.082.807.000	6.026.250.000	310.943.407.000	301.370.894.224
233	Kab. Magetan	36.272.130.000	26.947.807.345	248.274.674.000	240.542.165.635	9.725.000.000	9.676.513.092	294.271.804.000	277.166.486.072
234	Kab. Malang	91.141.827.000	88.582.620.305	631.658.933.000	630.155.496.596	22.708.500.000	21.723.499.500	745.509.260.000	740.461.616.401
235	Kab. Mojokerto	45.497.097.000	42.385.338.681	313.313.999.000	309.632.642.961	-	-	358.811.096.000	352.017.981.642
236	Kab. Nganjuk	96.778.375.000	80.527.573.246	346.618.845.000	342.434.412.938	6.000.000.000	3.000.000.000	449.397.220.000	425.961.986.184
237	Kab. Ngawi	123.664.677.000	119.030.977.685	294.403.797.000	287.916.401.192	11.028.203.000	10.826.125.000	429.096.677.000	417.773.503.877
238	Kab. Pacitan	101.073.168.000	87.622.209.155	230.184.140.000	229.345.817.146	1.800.000.000	1.582.000.000	333.057.308.000	318.550.026.301
239	Kab. Pamekasan	72.073.213.000	67.983.349.914	294.310.022.000	285.079.126.863	2.000.000.000	732.000.000	368.383.235.000	353.794.476.777
240	Kab. Pasuruan	94.714.929.000	81.902.795.975	435.404.978.000	429.756.000.668	-	-	530.119.907.000	511.658.796.643
241	Kab. Ponorogo	49.438.372.000	47.966.673.563	307.394.770.000	307.341.114.409	3.000.000.000	2.904.000.000	359.833.142.000	358.211.787.972
242	Kab. Probolinggo	21.576.197.000	18.739.331.481	307.138.515.000	301.910.661.734	1.742.000.000	1.460.000.000	330.456.712.000	322.109.993.215
243	Kab. Sampang	85.455.998.000	83.629.005.681	304.388.850.000	302.300.161.750	-	-	389.844.848.000	385.929.167.431
244	Kab. Sidoarjo	101.280.495.000	87.814.802.226	534.912.439.000	531.643.548.467	4.300.000.000	2.727.000.000	640.492.934.000	622.185.350.693
245	Kab. Situbondo	68.709.967.000	66.141.130.899	254.843.557.000	247.907.161.870	-	-	323.553.524.000	314.048.292.769
246	Kab. Sumenep	164.596.088.000	159.432.637.289	319.095.301.000	311.406.223.199	17.407.835.000	14.065.734.099	501.099.224.000	484.904.594.587
247	Kab. Trenggalek	52.158.814.000	45.908.758.050	248.704.322.000	244.189.475.277	4.860.000.000	4.797.280.395	305.723.136.000	294.895.513.722
248	Kab. Tuban	139.501.341.000	131.434.669.190	345.490.276.000	336.142.889.920	777.032.000	158.662.500	485.768.649.000	467.736.221.610

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAK FISIK		DAK NONFISIK		HIBAH		Pagu	Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(6)+(8)+(10)	(13)=(7)+(9)+(11)
249	Kab. Tulungagung	52.842.914.000	50.053.940.239	356.338.358.000	353.655.124.899	-	-	409.181.272.000	403.709.065.138
250	Kota Blitar	11.081.818.000	9.770.554.691	69.944.016.000	68.710.251.995	-	-	81.025.834.000	78.480.806.686
251	Kota Kediri	22.022.573.000	19.862.225.972	109.381.695.000	108.367.097.229	-	-	131.404.268.000	128.229.323.201
252	Kota Madiun	6.400.881.000	5.699.869.054	87.641.753.000	86.193.862.816	-	-	94.042.634.000	91.893.731.870
253	Kota Malang	18.755.225.000	15.967.259.384	239.840.673.000	236.209.303.697	-	-	258.595.898.000	252.176.563.081
254	Kota Mojokerto	72.301.955.000	59.676.281.059	69.966.844.000	69.028.074.410	-	-	142.268.799.000	128.704.355.469
255	Kota Pasuruan	50.274.608.000	34.244.880.377	88.461.740.000	87.318.152.879	3.000.000.000	222.000.000	141.736.348.000	121.785.033.256
256	Kota Probolinggo	10.711.215.000	9.746.975.796	84.289.229.000	81.783.656.461	-	-	95.000.444.000	91.530.632.257
257	Kota Surabaya	35.253.719.000	24.935.715.998	766.403.962.000	755.843.282.629	-	-	801.657.681.000	780.778.998.627
258	Kota Batu	6.720.943.000	6.446.324.347	77.204.068.000	76.315.502.009	-	-	83.925.011.000	82.761.826.356
259	Provinsi Kalimantan Barat	370.239.078.000	344.852.804.495	576.519.225.000	573.876.453.181	58.148.175.000	57.883.865.264	1.004.906.478.000	976.613.122.940
260	Kab. Bengkayang	196.039.574.000	182.008.336.572	162.513.478.000	160.615.434.136	-	-	358.553.052.000	342.623.770.708
261	Kab. Landak	103.635.964.000	100.331.253.761	185.158.077.000	183.328.484.719	600.000.000	540.000.000	289.394.041.000	284.199.738.480
262	Kab. Kapuas Hulu	88.301.465.000	87.192.364.246	175.852.862.000	173.073.288.400	-	-	264.154.327.000	260.265.652.646
263	Kab. Ketapang	119.557.165.000	114.987.829.184	285.114.916.000	271.488.154.294	3.600.520.000	1.320.520.000	408.272.601.000	387.796.503.478
264	Kab. Mempawah	63.827.499.000	57.902.292.022	128.938.596.000	126.593.746.430	-	-	192.766.095.000	184.496.038.452
265	Kab. Sambas	115.757.859.000	113.503.162.350	279.886.681.000	274.908.236.066	39.432.476.000	30.073.909.804	435.077.016.000	418.485.308.220
266	Kab. Sanggau	118.244.076.000	113.442.789.115	212.518.717.000	202.769.029.642	1.263.379.000	1.131.850.000	332.026.172.000	317.343.668.757
267	Kab. Sintang	92.769.450.000	89.331.513.594	267.561.757.000	264.767.347.503	4.500.000.000	4.500.000.000	364.831.207.000	358.598.861.097
268	Kota Pontianak	29.028.671.000	26.557.214.143	184.580.310.000	183.259.897.755	7.500.000.000	7.500.000.000	221.108.981.000	217.317.111.898
269	Kota Singkawang	44.867.922.000	43.304.250.229	96.723.069.000	94.814.578.578	-	-	141.590.991.000	138.118.828.807
270	Kab. Sekadau	57.561.714.000	53.107.711.529	104.331.940.000	102.507.076.149	-	-	161.893.654.000	155.614.787.678
271	Kab. Melawi	113.336.288.000	109.595.785.730	137.410.669.000	136.406.438.269	-	-	250.746.957.000	246.002.223.999
272	Kab. Kayong Utara	63.618.291.000	62.006.021.396	78.534.520.000	77.828.593.156	581.000	-	142.153.392.000	139.834.614.552
273	Kab. Kubu Raya	130.002.377.000	125.709.962.169	238.719.609.000	236.950.141.725	2.000.000.000	2.000.000.000	370.721.986.000	364.660.103.894
274	Provinsi Kalimantan Tengah	320.308.932.000	314.049.763.832	348.204.193.000	347.774.127.288	-	-	668.513.125.000	661.823.891.120
275	Kab. Barito Selatan	74.913.345.000	70.945.605.212	99.575.812.000	97.615.029.244	-	-	174.489.157.000	168.560.634.456
276	Kab. Barito Utara	86.481.099.000	84.255.485.379	116.570.627.000	112.428.034.000	-	-	203.051.726.000	196.683.519.379
277	Kab. Kapuas	160.990.443.000	155.922.847.825	229.254.307.000	226.520.370.375	492.000.000	492.000.000	390.736.750.000	382.935.218.200
278	Kab. Kotawaringin Barat	107.068.584.000	104.795.413.809	133.786.851.000	132.430.520.127	656.000.000	648.000.000	241.511.435.000	237.873.933.936
279	Kab. Kotawaringin Timur	34.715.118.000	32.967.221.235	201.138.177.000	196.646.347.832	-	-	235.853.295.000	229.613.569.067
280	Kota Palangkaraya	37.039.978.000	36.180.579.044	131.543.166.000	128.795.460.606	3.686.000.000	1.752.906.664	172.269.144.000	166.728.946.314
281	Kab. Katingan	148.076.169.000	138.035.682.119	133.831.596.000	131.274.669.547	-	-	281.907.765.000	269.310.351.666
282	Kab. Seruyan	56.598.798.000	55.546.371.251	90.293.262.000	85.953.782.274	-	-	146.892.060.000	141.500.153.525
283	Kab. Sukamara	27.172.104.000	26.194.721.023	40.044.726.000	39.229.078.327	-	-	67.216.830.000	65.423.799.350
284	Kab. Lamandau	52.351.580.000	48.810.084.704	72.113.892.000	69.053.001.802	-	-	124.465.472.000	117.863.086.506
285	Kab. Gunung Mas	73.996.025.000	72.770.345.330	117.356.238.000	115.581.871.642	-	-	191.352.263.000	188.352.216.972
286	Kab. Pulang Pisau	97.722.691.000	87.353.239.709	102.065.122.000	100.548.555.346	-	-	199.787.813.000	187.901.795.055
287	Kab. Murung Raya	69.094.139.000	68.253.683.794	112.685.028.000	112.101.273.350	-	-	181.779.167.000	180.354.957.144
288	Kab. Barito Timur	56.198.036.000	52.417.638.397	88.119.974.000	86.610.821.939	-	-	144.318.010.000	139.028.460.336
289	Provinsi Kalimantan Selatan	314.211.620.000	289.438.401.648	428.773.393.000	422.798.322.649	1.455.049.000	70.346.700	744.440.062.000	712.307.070.997
290	Kab. Banjar	129.128.933.000	118.711.313.776	229.136.958.000	228.210.843.847	3.036.000.000	2.444.000.000	361.301.891.000	349.366.157.623
291	Kab. Barito Kuala	95.939.302.000	92.797.566.827	180.191.759.000	178.421.924.512	295.785.000	59.635.000	276.426.846.000	271.279.126.339
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	111.012.944.000	104.943.218.466	129.317.889.000	126.192.272.087	108.000.000	108.000.000	240.438.833.000	231.243.490.553
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	48.694.517.000	42.447.638.277	132.868.705.000	124.205.309.108	847.816.000	491.901.200	182.411.038.000	167.144.848.585
294	Kab. Hulu Sungai Utara	52.192.602.000	49.415.656.457	118.282.672.000	111.821.774.551	-	-	170.475.274.000	161.237.431.008
295	Kab. Kotabaru	51.493.500.000	49.311.048.232	155.993.813.000	148.790.056.994	-	-	207.487.313.000	198.101.105.226
296	Kab. Tabalong	51.241.703.000	47.030.532.569	144.201.577.000	142.832.094.765	8.000.000.000	3.962.209.421	203.443.280.000	193.824.836.755
297	Kab. Tanah Laut	71.785.665.000	66.466.496.948	174.567.623.000	166.462.543.759	1.156.000.000	-	247.509.288.000	232.929.040.707
298	Kab. Tapin	46.131.761.000	44.566.527.275	105.796.791.000	102.762.572.817	38.222.000	34.400.000	151.966.774.000	147.363.500.092

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAK FISIK		DAK NONFISIK		HIBAH		Pagu	Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(6)+(8)+(10)	(13)=(7)+(9)+(11)
299	Kota Banjarbaru	30.893.582.000	28.894.434.860	110.983.838.000	110.003.668.558	-	-	141.877.420.000	138.898.103.418
300	Kota Banjarmasin	22.453.192.000	19.869.921.263	204.602.951.000	203.704.855.183	2.628.000.000	1.488.000.000	229.684.143.000	225.062.776.446
301	Kab. Balangan	48.528.228.000	46.040.531.309	85.228.922.000	82.079.292.550	900.000.000	600.000.000	134.657.150.000	128.719.823.859
302	Kab. Tanah Bumbu	70.378.968.000	64.938.465.766	144.599.445.000	142.806.532.637	1.067.491.000	419.319.072	216.045.904.000	208.164.317.475
303	Provinsi Kalimantan Timur	190.152.584.000	185.061.506.345	492.456.838.000	480.954.240.878	-	-	682.609.422.000	666.015.747.223
304	Kab. Berau	61.943.730.000	52.763.540.954	128.340.854.000	118.536.373.050	-	-	190.284.584.000	171.299.914.004
305	Kab. Kutai Kartanegara	116.045.496.000	110.616.686.334	384.164.756.000	368.873.393.323	5.874.000.000	3.567.000.000	506.084.252.000	483.057.079.657
306	Kab. Kutai Barat	6.354.652.000	4.187.669.450	93.100.966.000	87.378.880.332	540.000.000	522.000.000	99.995.618.000	92.088.549.782
307	Kab. Kutai Timur	54.032.105.000	51.166.480.257	194.092.960.000	190.831.649.267	4.500.000.000	4.500.000.000	252.625.065.000	246.498.129.524
308	Kab. Paser	96.295.393.000	94.136.143.628	144.800.950.000	140.283.296.677	3.999.000.000	-	245.095.343.000	234.419.440.305
309	Kota Balikpapan	10.525.193.000	9.239.248.876	213.158.234.000	207.681.065.433	2.040.000.000	951.000.000	225.723.427.000	217.871.314.309
310	Kota Bontang	9.860.326.000	9.498.072.964	74.097.722.000	70.939.027.632	-	-	83.958.048.000	80.437.100.596
311	Kota Samarinda	35.038.294.000	33.979.871.380	275.808.302.000	264.146.357.823	-	-	310.846.596.000	298.126.229.203
312	Kab. Penajam Paser Utara	61.919.827.000	56.150.254.530	95.883.119.000	92.925.793.808	1.251.288.000	1.117.682.811	159.054.234.000	150.193.731.149
313	Kab. Mahakam Ulu	53.219.363.000	52.387.489.710	25.902.690.000	23.989.032.180	-	-	79.122.053.000	76.376.521.890
314	Provinsi Sulawesi Utara	346.698.313.000	335.435.196.455	397.755.008.000	394.478.627.561	1.381.954.000	118.634.302	745.835.275.000	730.032.458.318
315	Kab. Bolaang Mongondow	119.162.647.000	113.708.772.524	116.877.527.000	114.193.278.534	495.580.000	342.325.200	236.535.754.000	228.244.376.258
316	Kab. Minahasa	41.862.866.000	41.435.566.583	165.193.217.000	162.443.032.315	-	-	207.056.083.000	203.878.598.898
317	Kab. Sangihe	47.897.691.000	43.045.289.060	94.539.365.000	91.799.965.800	500.000.000	500.000.000	142.937.056.000	135.345.254.860
318	Kota Bitung	27.817.873.000	27.038.872.350	84.724.780.000	81.141.671.558	-	-	112.542.653.000	108.180.543.908
319	Kota Manado	36.401.021.000	35.004.243.654	158.661.742.000	156.509.704.652	-	-	195.062.763.000	191.513.948.306
320	Kab. Kepulauan Talaud	116.518.002.000	113.380.139.322	85.494.283.000	78.615.765.836	-	-	202.012.285.000	191.995.905.158
321	Kab. Minahasa Selatan	74.468.653.000	71.602.745.422	127.819.379.000	127.561.710.000	20.859.638.000	18.517.439.072	223.147.670.000	217.681.894.494
322	Kota Tomohon	20.462.863.000	19.715.255.661	55.480.048.000	55.292.731.480	-	-	75.942.911.000	75.007.987.141
323	Kab. Minahasa Utara	144.372.833.000	121.157.580.151	106.127.444.000	104.888.078.730	-	-	250.500.277.000	226.045.658.881
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	14.212.940.000	13.386.447.613	45.221.937.000	39.851.794.608	2.000.000.000	-	61.434.877.000	53.238.242.221
325	Kota Kotamobagu	10.733.523.000	10.546.566.350	54.220.392.000	52.821.602.927	-	-	64.953.915.000	63.368.169.277
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	68.096.020.000	61.946.075.435	52.608.722.000	51.001.656.681	-	-	120.704.742.000	112.947.732.116
327	Kab. Minahasa Tenggara	31.100.985.000	23.753.411.939	72.048.016.000	70.401.073.822	600.000.000	-	103.749.001.000	94.154.485.761
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	46.688.982.000	38.113.084.315	44.293.520.000	43.074.151.297	-	-	90.982.502.000	81.187.235.612
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	27.134.910.000	26.481.608.264	44.195.967.000	43.270.820.621	-	-	71.330.877.000	69.752.428.885
330	Provinsi Sulawesi Tengah	410.383.129.000	382.481.075.916	403.082.334.000	401.638.583.073	3.925.956.000	3.775.515.621	817.391.419.000	787.895.174.610
331	Kab. Banggai	65.881.408.000	64.442.425.432	195.003.515.000	189.277.832.738	8.745.034.000	5.641.246.503	269.629.957.000	259.361.504.673
332	Kab. Banggai Kepulauan	57.589.342.000	55.071.492.302	84.198.602.000	81.366.693.929	-	-	141.787.944.000	136.438.186.231
333	Kab. Buol	38.418.897.000	36.836.924.810	81.453.582.000	78.258.619.129	3.716.184.000	3.715.438.034	123.588.663.000	118.810.981.973
334	Kab. Tolitoli	135.734.765.000	124.878.887.210	112.392.545.000	111.901.516.695	4.497.859.000	2.830.154.400	252.625.169.000	239.610.558.305
335	Kab. Donggala	124.492.956.000	121.960.475.157	173.638.883.000	166.187.637.740	3.000.000.000	750.000.000	301.131.839.000	288.898.112.897
336	Kab. Morowali	61.158.352.000	57.960.526.910	92.121.056.000	92.043.521.500	-	-	153.279.408.000	150.004.048.410
337	Kab. Poso	69.849.450.000	67.914.286.731	134.215.526.000	130.922.786.507	8.675.115.000	7.922.611.981	212.740.091.000	206.759.685.219
338	Kota Palu	104.667.932.000	102.487.426.907	166.039.665.000	165.918.598.227	-	-	270.707.597.000	268.406.025.134
339	Kab. Parigi Moutong	211.987.267.000	210.878.154.045	237.598.961.000	234.570.328.531	3.683.314.000	2.756.127.007	453.269.542.000	448.204.609.583
340	Kab. Tojo Una Una	108.024.603.000	105.409.293.801	106.570.729.000	106.269.911.878	2.720.000.000	2.693.331.842	217.315.332.000	214.372.537.521
341	Kab. Sigi	167.272.983.000	159.845.498.097	150.815.163.000	147.160.113.265	1.000.000.000	-	319.088.146.000	307.005.611.362
342	Kab. Banggai Laut	37.559.332.000	36.693.205.835	49.154.481.000	48.815.110.460	-	-	86.713.813.000	85.508.316.295
343	Kab. Morowali Utara	42.573.110.000	42.255.915.242	88.376.576.000	88.227.480.067	-	-	130.949.686.000	130.483.395.309
344	Provinsi Sulawesi Selatan	314.693.468.000	266.596.196.619	1.169.091.033.000	1.168.526.582.842	4.236.446.000	3.990.214.198	1.488.020.947.000	1.439.112.993.659
345	Kab. Bantaeng	44.338.113.000	43.509.867.106	123.017.880.000	120.452.746.020	5.306.000.000	5.284.256.539	172.661.993.000	169.246.869.665
346	Kab. Barru	40.946.483.000	38.885.902.382	120.742.153.000	115.982.418.478	-	-	161.688.636.000	154.868.320.860
347	Kab. Bone	155.855.704.000	153.946.444.445	379.578.428.000	375.656.417.601	912.298.000	388.085.000	536.346.430.000	529.990.947.046
348	Kab. Bulukumba	179.288.460.000	174.343.200.253	211.741.054.000	209.546.106.353	600.000.000	462.000.000	391.629.514.000	384.351.306.606

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAK FISIK		DAK NONFISIK		HIBAH		Pagu	Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(6)+(8)+(10)	(13)=(7)+(9)+(11)
349	Kab. Enrekang	135.681.561.000	132.996.840.736	152.503.621.000	152.408.633.803	-	-	288.185.182.000	285.405.474.539
350	Kab. Gowa	114.696.595.000	112.231.284.439	292.652.825.000	288.888.292.000	-	-	407.349.420.000	401.119.576.439
351	Kab. Jeneponto	38.033.513.000	35.362.887.490	181.747.509.000	180.813.566.617	-	-	219.781.022.000	216.176.454.107
352	Kab. Luwu	112.822.826.000	109.863.351.924	205.635.720.000	205.309.617.395	3.209.197.000	2.737.701.426	321.667.743.000	317.910.670.745
353	Kab. Luwu Utara	62.237.088.000	60.392.075.464	156.415.509.000	156.236.772.627	6.816.076.000	3.804.076.000	225.468.673.000	220.432.924.091
354	Kab. Maros	104.026.463.000	100.590.633.464	186.419.209.000	185.527.964.770	-	-	290.445.672.000	286.118.598.234
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	137.689.857.000	134.234.092.286	214.596.040.000	212.263.202.199	2.000.000.000	2.000.000.000	354.285.897.000	348.497.294.485
356	Kota Palopo	40.996.811.000	40.727.924.665	97.397.277.000	96.299.360.667	-	-	138.394.088.000	137.027.285.332
357	Kab. Luwu Timur	28.707.900.000	25.834.967.779	137.999.820.000	132.800.357.534	11.548.286.000	7.514.910.174	178.256.006.000	166.150.235.487
358	Kab. Pinrang	44.674.855.000	43.686.573.267	198.462.757.000	198.189.066.161	176.660.000	57.109.900	243.314.272.000	241.932.749.328
359	Kab. Sinjai	141.894.824.000	141.244.062.442	159.213.419.000	156.971.414.862	2.700.000.000	-	303.808.243.000	298.215.477.304
360	Kab. Kepulauan Selayar	97.595.853.000	31.419.707.650	116.197.940.000	110.663.419.347	-	-	213.793.793.000	142.083.126.997
361	Kab. Sidenreng Rappang	73.101.694.000	71.096.621.617	169.966.557.000	169.055.884.647	2.615.440.000	1.794.000.000	245.683.691.000	241.946.506.264
362	Kab. Soppeng	105.744.886.000	101.014.558.984	143.229.199.000	142.905.251.937	124.434.000	109.496.570	249.098.519.000	244.029.307.491
363	Kab. Takalar	92.338.874.000	90.081.625.629	165.681.943.000	165.435.538.072	-	-	258.020.817.000	255.517.163.701
364	Kab. Tana Toraja	81.284.453.000	79.460.004.990	161.105.396.000	160.598.338.707	-	-	242.389.849.000	240.058.343.697
365	Kab. Wajo	127.300.312.000	125.265.725.567	210.810.542.000	205.462.950.588	2.851.577.000	1.141.524.160	340.962.431.000	331.870.200.315
366	Kota Parepare	68.512.788.000	65.244.248.080	82.980.481.000	79.907.764.465	-	-	151.493.269.000	145.152.012.545
367	Kota Makassar	48.664.620.000	36.340.464.421	447.401.195.000	444.756.115.216	-	-	496.065.815.000	481.096.579.637
368	Kab. Toraja Utara	56.132.325.000	53.592.234.024	161.592.171.000	161.472.646.170	-	-	217.724.496.000	215.064.880.194
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	386.462.690.000	374.677.845.729	509.462.018.000	507.170.020.224	2.416.860.000	2.043.022.600	898.341.568.000	883.890.888.553
370	Kab. Buton	67.737.649.000	66.828.394.789	86.663.083.000	81.298.731.205	-	-	154.400.732.000	148.127.125.994
371	Kab. Konawe	141.363.649.000	139.107.999.343	184.032.569.000	184.002.862.990	2.173.339.000	2.173.338.172	327.569.557.000	325.284.200.505
372	Kab. Kolaka	97.430.138.000	96.275.014.605	124.183.118.000	123.422.456.194	4.613.033.000	4.613.024.050	226.226.289.000	224.310.494.849
373	Kab. Muna	114.049.654.000	112.682.713.946	195.292.649.000	194.888.473.400	-	-	309.342.303.000	307.571.187.346
374	Kota Kendari	84.857.487.000	78.995.243.041	164.593.473.000	164.279.714.637	-	-	249.450.960.000	243.274.957.678
375	Kota Bau-bau	132.078.427.000	127.426.879.572	102.362.934.000	100.687.496.063	-	-	234.441.361.000	228.114.375.635
376	Kab. Konawe Selatan	120.779.691.000	116.311.418.887	190.095.839.000	182.784.339.096	-	-	310.875.530.000	299.095.757.983
377	Kab. Bombana	59.622.525.000	57.368.240.596	122.873.416.000	122.851.608.760	-	-	182.495.941.000	180.219.849.356
378	Kab. Wakatobi	105.373.942.000	102.579.411.521	96.104.923.000	91.236.416.199	5.400.000.000	3.198.000.000	206.878.865.000	197.013.827.720
379	Kab. Kolaka Utara	53.695.115.000	52.276.336.249	95.185.572.000	95.105.134.730	4.203.143.000	4.125.468.450	153.083.830.000	151.506.939.429
380	Kab. Konawe Utara	50.909.594.000	50.554.731.704	77.289.009.000	77.230.453.000	-	-	128.198.603.000	127.785.184.704
381	Kab. Buton Utara	80.180.628.000	78.105.256.959	62.360.742.000	62.342.640.693	-	-	142.541.370.000	140.447.897.652
382	Kab. Konawe Kepulauan	70.744.576.000	69.883.510.111	34.543.703.000	34.542.744.318	-	-	105.288.279.000	104.426.254.429
383	Kab. Kolaka Timur	50.011.443.000	41.608.912.563	82.823.323.000	81.846.969.430	-	-	132.834.766.000	123.455.881.993
384	Kab. Muna Barat	60.781.627.000	60.126.525.397	80.082.015.000	80.045.218.388	-	-	140.863.642.000	140.171.743.785
385	Kab. Buton Tengah	91.224.996.000	83.921.812.223	79.065.997.000	78.552.138.000	-	-	170.290.993.000	162.473.950.223
386	Kab. Buton Selatan	45.275.127.000	44.603.654.621	62.831.072.000	61.864.421.459	-	-	108.106.199.000	106.468.076.080
387	Provinsi Bali	119.564.650.000	94.198.493.352	588.570.736.000	579.529.779.834	-	-	708.135.386.000	673.728.273.186
388	Kab. Badung	9.116.247.000	7.305.129.366	210.010.900.000	208.523.858.686	-	-	219.127.147.000	215.828.988.052
389	Kab. Bangli	145.734.600.000	135.907.190.828	115.736.903.000	114.379.354.870	-	-	261.471.503.000	250.286.545.698
390	Kab. Buleleng	72.212.251.000	63.640.144.462	308.430.260.000	307.011.677.006	-	-	380.642.511.000	370.651.821.468
391	Kab. Gianyar	8.910.903.000	7.170.713.481	183.718.670.000	181.028.691.968	1.156.000.000	848.900.704	193.785.573.000	189.048.306.153
392	Kab. Jembrana	3.217.071.000	2.943.049.770	112.483.132.000	110.740.144.465	-	-	115.700.203.000	113.683.194.235
393	Kab. Karangasem	7.509.217.000	6.905.970.332	225.720.376.000	221.536.001.041	-	-	233.229.593.000	228.441.971.373
394	Kab. Klungkung	104.582.406.000	102.526.224.590	111.208.239.000	110.648.932.732	-	-	215.790.645.000	213.175.157.322
395	Kab. Tabanan	34.436.404.000	21.607.724.102	189.639.496.000	186.811.513.150	1.000.000.000	24.000.000	225.075.900.000	208.443.237.252
396	Kota Denpasar	15.123.843.000	11.251.952.213	222.757.392.000	217.930.414.096	-	-	237.881.235.000	229.182.366.309
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	341.137.435.000	306.852.319.835	620.835.771.000	617.284.246.560	892.411.000	10.233.268	962.865.617.000	924.146.799.663
398	Kab. Bima	200.043.516.000	194.816.235.093	271.276.706.000	269.934.178.429	3.838.992.000	3.275.652.125	475.159.214.000	468.026.065.647

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAK FISIK		DAK NONFISIK		HIBAH		Pagu	Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(6)+(8)+(10)	(13)=(7)+(9)+(11)
399	Kab. Dompu	120.081.244.000	119.298.409.287	128.769.485.000	126.579.039.961	4.884.906.000	764.996.000	253.735.635.000	246.642.445.248
400	Kab. Lombok Barat	82.222.285.000	78.801.112.886	256.138.333.000	255.773.676.793	3.000.000.000	3.000.000.000	341.360.618.000	337.574.789.679
401	Kab. Lombok Tengah	156.480.063.000	149.737.378.651	366.662.971.000	365.993.044.816	113.724.000	53.025.943	523.256.758.000	515.783.449.410
402	Kab. Lombok Timur	232.106.006.000	228.547.937.638	483.110.449.000	480.345.844.170	22.728.242.000	14.733.679.000	737.944.697.000	723.627.460.808
403	Kab. Sumbawa	163.712.608.000	158.162.374.831	242.300.822.000	236.426.871.528	36.380.100.000	28.654.298.098	442.393.530.000	423.243.544.457
404	Kota Mataram	97.894.932.000	89.596.603.839	157.473.584.000	155.211.039.615	3.750.000.000	3.750.000.000	259.118.516.000	248.557.643.454
405	Kota Bima	43.745.879.000	42.423.553.167	86.141.569.000	85.699.394.970	-	-	129.887.448.000	128.122.948.137
406	Kab. Sumbawa Barat	54.803.261.000	52.923.143.183	94.984.913.000	94.368.736.979	1.472.000.000	1.472.000.000	151.260.174.000	148.763.880.162
407	Kab. Lombok Utara	95.963.825.000	88.485.195.965	106.137.540.000	104.721.550.600	3.853.000.000	2.840.000.000	205.954.365.000	196.046.746.565
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	474.648.628.000	460.078.252.346	816.088.697.000	805.764.320.512	1.662.044.000	1.094.002.649	1.292.399.369.000	1.266.936.575.507
409	Kab. Alor	121.278.630.000	118.801.505.951	138.979.085.000	137.323.876.736	2.500.000.000	1.870.000.000	262.757.715.000	257.995.382.687
410	Kab. Belu	129.745.449.000	124.363.968.363	123.985.693.000	122.872.138.528	5.250.297.000	2.977.700.415	258.981.439.000	250.213.807.306
411	Kab. Ende	79.347.502.000	71.439.403.812	151.794.481.000	148.123.993.940	-	-	231.141.983.000	219.563.397.752
412	Kab. Flores Timur	111.659.821.000	108.044.563.225	149.938.980.000	148.207.011.139	600.000.000	-	262.198.801.000	256.251.574.364
413	Kab. Kupang	142.143.459.000	139.085.857.056	207.678.987.000	191.331.481.601	5.900.779.000	4.065.975.781	355.723.225.000	334.483.314.438
414	Kab. Lembata	103.612.470.000	101.002.738.778	78.085.112.000	77.772.983.461	-	-	181.697.582.000	178.775.722.239
415	Kab. Manggarai	135.284.407.000	131.686.954.206	198.383.653.000	190.199.459.621	3.900.000.000	3.825.000.000	337.568.060.000	325.711.413.827
416	Kab. Ngada	100.319.892.000	96.003.317.503	109.742.781.000	108.774.097.759	-	-	210.062.673.000	204.777.415.262
417	Kab. Sikka	97.460.636.000	88.688.789.277	177.461.234.000	177.235.936.256	-	-	274.921.870.000	265.924.725.533
418	Kab. Sumba Barat	155.644.945.000	150.844.638.101	65.086.734.000	61.678.098.000	-	-	220.731.679.000	212.522.736.101
419	Kab. Sumba Timur	135.069.151.000	132.221.921.163	144.271.574.000	138.183.616.652	-	-	279.340.725.000	270.405.537.815
420	Kab. Timor Tengah Selatan	201.615.894.000	198.112.497.836	226.128.614.000	205.231.171.055	-	-	427.744.508.000	403.343.668.891
421	Kab. Timor Tengah Utara	80.119.593.000	75.286.355.814	165.040.674.000	161.896.816.610	-	-	245.160.267.000	237.183.172.424
422	Kota Kupang	24.028.315.000	22.979.066.414	158.264.875.000	152.755.688.383	-	-	182.293.190.000	175.734.754.797
423	Kab. Rote Ndao	168.350.789.000	159.090.994.820	113.206.066.000	104.379.524.332	-	-	281.556.855.000	263.470.519.152
424	Kab. Manggarai Barat	361.160.259.000	340.856.707.562	156.282.729.000	155.465.567.159	1.060.269.000	839.276.502	518.503.257.000	497.161.551.223
425	Kab. Nagekeo	48.699.962.000	45.537.537.448	90.477.097.000	86.252.105.257	-	-	139.177.059.000	131.789.642.705
426	Kab. Sumba Barat Daya	202.476.770.000	200.621.098.674	186.278.168.000	177.847.281.217	-	-	388.754.938.000	378.468.379.891
427	Kab. Sumba Tengah	120.718.643.000	116.831.916.721	57.536.924.000	57.317.169.350	-	-	178.255.567.000	174.149.086.071
428	Kab. Manggarai Timur	245.435.058.000	238.941.839.387	185.714.867.000	184.361.927.737	2.932.000	-	431.152.857.000	423.303.767.124
429	Kab. Sabu Raijua	100.978.544.000	98.108.941.054	64.118.968.000	64.083.533.747	-	-	165.097.512.000	162.192.474.801
430	Kab. Malaka	172.814.380.000	170.513.991.175	109.743.840.000	109.681.410.918	-	-	282.558.220.000	280.195.402.093
431	Provinsi Maluku	407.509.009.000	401.876.591.216	343.545.928.000	342.145.274.528	-	-	751.054.937.000	744.021.865.744
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	75.116.767.000	67.466.922.283	82.605.178.000	74.789.907.498	-	-	157.721.945.000	142.256.829.781
433	Kab. Maluku Tengah	157.470.428.000	150.975.039.124	230.352.120.000	223.382.336.571	6.210.000.000	2.078.000.000	394.032.548.000	376.435.375.695
434	Kab. Maluku Tenggara	231.749.168.000	222.663.255.505	91.144.944.000	89.745.702.373	-	-	322.894.112.000	312.408.957.878
435	Kab. Buru	57.792.313.000	55.802.847.217	110.462.134.000	106.935.107.539	-	-	168.254.447.000	162.737.954.756
436	Kota Ambon	26.098.778.000	24.819.609.212	161.580.469.000	151.977.239.872	-	-	187.679.247.000	176.796.849.084
437	Kab. Seram Bagian Barat	68.787.376.000	66.264.080.888	141.729.875.000	133.932.655.484	-	-	210.517.251.000	200.196.736.372
438	Kab. Seram Bagian Timur	94.353.111.000	92.957.790.002	118.182.494.000	116.728.633.664	-	-	212.535.605.000	209.686.423.666
439	Kab. Kepulauan Aru	96.114.865.000	85.546.188.309	105.394.841.000	97.927.043.720	-	-	201.509.706.000	183.473.232.029
440	Kota Tual	30.178.089.000	29.210.081.550	47.319.047.000	46.700.037.490	-	-	77.497.136.000	75.910.119.040
441	Kab. Maluku Barat Daya	84.648.111.000	77.876.896.857	80.062.253.000	73.932.842.856	-	-	164.710.364.000	151.809.739.713
442	Kab. Buru Selatan	49.554.575.000	48.524.677.955	68.724.792.000	63.605.287.995	-	-	118.279.367.000	112.129.965.950
443	Provinsi Papua	195.899.501.000	178.036.462.636	24.561.080.000	23.614.073.700	-	-	220.460.581.000	201.650.536.336
444	Kab. Biak Numfor	211.459.973.000	207.622.458.820	142.045.084.000	139.595.435.293	-	-	353.505.057.000	347.217.894.113
445	Kab. Jayapura	133.330.630.000	124.114.253.656	139.551.456.000	138.960.322.601	-	-	272.882.086.000	263.074.576.257
446	Kab. Jayawijaya	218.328.356.000	212.671.067.243	140.834.970.000	135.748.393.965	-	-	359.163.326.000	348.419.461.208
447	Kab. Merauke	204.133.390.000	196.125.065.578	206.777.940.000	202.880.938.977	2.000.000.000	920.000.000	412.911.330.000	399.926.004.555
448	Kab. Mimika	57.231.025.000	52.104.542.172	172.395.183.000	170.439.151.417	-	-	229.626.208.000	222.543.693.589

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAK FISIK		DAK NONFISIK		HIBAH		Pagu	Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(6)+(8)+(10)	(13)=(7)+(9)+(11)
449	Kab. Nabire	190.088.494.000	182.019.470.856	164.286.198.000	162.656.805.392	2.000.000.000	-	356.374.692.000	344.676.276.248
450	Kab. Paniai	87.264.547.000	80.850.031.196	143.828.714.000	142.199.755.468	-	-	231.093.261.000	223.049.786.664
451	Kab. Puncak Jaya	219.191.338.000	212.691.421.450	42.575.381.000	39.349.414.950	-	-	261.766.719.000	252.040.836.400
452	Kab. Kepulauan Yapen	178.164.914.000	144.778.502.373	108.589.441.000	104.751.704.127	-	-	286.754.355.000	249.530.206.500
453	Kota Jayapura	50.587.055.000	48.296.020.730	178.243.794.000	172.644.571.996	-	-	228.830.849.000	220.940.592.726
454	Kab. Sarmi	70.178.847.000	68.665.614.367	51.152.871.000	46.404.979.374	-	-	121.331.718.000	115.070.593.741
455	Kab. Keerom	71.739.758.000	68.991.342.965	71.455.763.000	68.377.220.915	-	-	143.195.521.000	137.368.563.880
456	Kab. Yahukimo	356.427.930.000	353.833.361.771	166.989.674.000	164.780.496.731	-	-	523.417.604.000	518.613.858.502
457	Kab. Pegunungan Bintang	167.099.661.000	164.932.434.594	85.902.104.000	85.708.341.700	-	-	253.001.765.000	250.640.776.294
458	Kab. Tolikara	165.486.926.000	164.318.084.282	100.783.376.000	99.134.438.052	-	-	266.270.302.000	263.452.522.334
459	Kab. Boven Digoel	62.632.114.000	55.667.417.766	74.128.137.000	67.182.785.036	-	-	136.760.251.000	122.850.202.802
460	Kab. Mappi	155.781.036.000	136.013.054.140	107.912.548.000	106.933.646.900	-	-	263.693.584.000	242.946.701.040
461	Kab. Asmat	122.403.237.000	116.111.393.640	115.187.238.000	107.806.391.607	-	-	237.590.475.000	223.917.785.247
462	Kab. Waropen	108.118.683.000	105.025.340.550	50.943.162.000	50.205.930.777	-	-	159.061.845.000	155.231.271.327
463	Kab. Supiori	98.291.051.000	94.552.139.451	34.778.223.000	31.926.874.764	-	-	133.069.274.000	126.479.014.215
464	Kab. Mamberamo Raya	94.751.451.000	93.330.318.516	42.573.486.000	38.965.952.000	-	-	137.324.937.000	132.296.270.516
465	Kab. Mamberamo Tengah	56.976.819.000	56.159.564.467	32.712.588.000	31.924.080.000	-	-	89.689.407.000	88.083.644.467
466	Kab. Yalimo	86.494.009.000	72.751.000.300	45.601.311.000	44.265.818.650	-	-	132.095.320.000	117.016.818.950
467	Kab. Lanny Jaya	262.997.721.000	253.545.899.000	96.412.494.000	95.903.145.633	-	-	359.410.215.000	349.449.044.633
468	Kab. Nduga	149.130.088.000	139.946.940.024	34.030.465.000	33.871.472.300	-	-	183.160.553.000	173.818.412.324
469	Kab. Dogiyai	105.052.520.000	103.990.866.411	65.784.446.000	60.988.993.148	-	-	170.836.966.000	164.979.859.559
470	Kab. Puncak	176.914.462.000	170.212.364.486	32.861.463.000	23.427.471.100	-	-	209.775.925.000	193.639.835.586
471	Kab. Intan Jaya	89.110.374.000	83.068.726.719	29.133.227.000	28.716.476.150	-	-	118.243.601.000	111.785.202.869
472	Kab. Deiyai	97.268.430.000	96.308.113.930	68.973.102.000	68.651.707.640	-	-	166.241.532.000	164.959.821.570
473	Provinsi Maluku Utara	383.597.669.000	341.539.481.357	225.395.770.000	220.375.658.371	-	-	608.993.439.000	561.915.139.728
474	Kab. Halmahera Tengah	61.563.366.000	60.931.720.733	53.461.646.000	51.921.016.377	-	-	115.025.012.000	112.852.737.110
475	Kota Ternate	60.005.264.000	58.104.997.938	99.539.784.000	98.719.078.918	-	-	159.545.048.000	156.824.076.856
476	Kab. Halmahera Barat	39.609.274.000	39.162.822.884	96.041.890.000	93.638.012.073	-	-	135.651.164.000	132.800.834.957
477	Kab. Halmahera Timur	85.690.416.000	84.108.090.337	69.746.531.000	61.521.036.116	576.000.000	-	156.012.947.000	145.629.126.453
478	Kab. Halmahera Selatan	175.098.477.000	158.645.500.322	168.825.709.000	165.351.661.193	1.998.000.000	1.998.000.000	345.922.186.000	325.995.161.515
479	Kab. Halmahera Utara	81.327.707.000	79.947.438.167	109.637.389.000	101.278.407.332	4.968.000.000	2.876.000.000	195.933.096.000	184.101.845.499
480	Kab. Kepulauan Sula	173.027.659.000	164.332.022.514	72.430.097.000	71.975.545.456	-	-	245.457.756.000	236.307.567.970
481	Kota Tidore Kepulauan	143.476.648.000	139.891.385.564	74.913.973.000	71.022.598.654	-	-	218.390.621.000	210.913.984.218
482	Kab. Pulau Morotai	180.698.802.000	177.600.837.573	63.287.957.000	62.067.500.253	-	-	243.986.759.000	239.668.337.826
483	Kab. Pulau Taliabu	88.665.198.000	84.101.024.423	55.429.542.000	54.941.014.000	-	-	144.094.740.000	139.042.038.423
484	Provinsi Banten	146.012.230.000	137.858.268.059	1.046.758.435.000	1.026.072.183.168	-	-	1.192.770.665.000	1.163.930.451.227
485	Kab. Lebak	51.701.797.000	50.208.365.734	480.265.515.000	469.336.735.104	22.589.006.000	17.746.780.662	554.556.318.000	537.291.881.500
486	Kab. Pandeglang	99.497.719.000	95.786.351.550	467.492.438.000	460.611.884.837	148.627.000	63.518.000	567.138.784.000	556.461.754.387
487	Kab. Serang	96.280.747.000	87.132.804.322	493.804.841.000	485.142.630.756	90.349.000	48.275.000	590.175.937.000	572.323.710.078
488	Kab. Tangerang	83.700.360.000	76.607.546.382	777.766.010.000	768.240.032.616	-	-	861.466.370.000	844.847.578.998
489	Kota Cilegon	34.927.374.000	28.997.859.171	153.103.222.000	152.410.101.697	-	-	188.030.596.000	181.407.960.868
490	Kota Tangerang	11.363.304.000	10.347.097.928	449.099.251.000	438.259.576.826	-	-	460.462.555.000	448.606.674.754
491	Kota Serang	43.342.417.000	40.632.234.465	230.392.823.000	228.371.234.400	-	-	273.735.240.000	269.003.468.865
492	Kota Tangerang Selatan	31.750.651.000	29.684.942.691	331.342.198.000	327.584.087.099	-	-	363.092.849.000	357.269.029.790
493	Provinsi Bangka Belitung	170.824.372.000	124.183.308.680	175.036.325.000	173.959.469.084	-	-	345.860.697.000	298.142.777.764
494	Kab. Bangka	33.322.702.000	32.199.382.548	131.381.700.000	130.851.541.156	600.000.000	354.000.000	165.304.402.000	163.404.923.704
495	Kab. Belitung	73.229.668.000	69.464.145.429	88.175.981.000	87.544.492.820	-	-	161.405.649.000	157.008.638.249
496	Kota Pangkal Pinang	93.925.773.000	90.605.528.202	83.055.754.000	81.590.070.746	-	-	176.981.527.000	172.195.598.948
497	Kab. Bangka Selatan	182.877.498.000	170.438.167.792	100.079.378.000	97.533.832.306	-	-	282.956.876.000	267.972.000.098
498	Kab. Bangka Tengah	35.102.298.000	34.618.692.350	98.612.046.000	95.989.481.020	-	-	133.714.344.000	130.608.173.370

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAK FISIK		DAK NONFISIK		HIBAH		Pagu	Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(6)+(8)+(10)	(13)=(7)+(9)+(11)
499	Kab. Bangka Barat	53.585.059.000	47.331.879.395	99.855.642.000	99.512.205.178	500.000.000	452.000.000	153.940.701.000	147.296.084.573
500	Kab. Belitung Timur	21.210.433.000	15.453.308.952	77.750.138.000	77.429.731.884	-	-	98.960.571.000	92.883.040.836
501	Provinsi Gorontalo	165.500.063.000	140.281.348.223	178.924.722.000	176.917.596.975	1.739.495.000	1.234.701.108	346.164.280.000	318.433.646.306
502	Kab. Boalemo	87.852.407.000	82.015.800.451	88.820.575.000	88.058.604.481	-	-	176.672.982.000	170.074.404.932
503	Kab. Gorontalo	111.395.623.000	104.634.057.646	197.830.534.000	194.251.932.525	12.215.122.000	8.925.881.073	321.441.279.000	307.811.871.244
504	Kota Gorontalo	41.534.154.000	39.115.900.875	94.346.765.000	93.380.844.002	-	-	135.880.919.000	132.496.744.877
505	Kab. Pohuwato	97.585.766.000	91.484.648.248	90.688.188.000	90.274.517.655	5.250.648.000	4.188.637.350	193.524.602.000	185.947.803.253
506	Kab. Bone Bolango	60.100.262.000	59.423.730.435	107.515.006.000	103.256.259.956	7.659.035.000	4.068.377.299	175.274.303.000	166.748.367.690
507	Kab. Gorontalo Utara	71.177.521.000	67.061.031.321	85.664.040.000	85.496.880.911	-	-	156.841.561.000	152.557.912.232
508	Provinsi Kepulauan Riau	313.990.759.000	299.220.452.769	291.113.975.000	287.543.122.625	-	-	605.104.734.000	586.763.575.394
509	Kab. Natuna	119.489.057.000	115.479.222.997	67.742.206.000	65.055.724.310	2.478.000.000	1.254.000.000	189.709.263.000	181.788.947.307
510	Kab. Kepulauan Anambas	115.893.412.000	100.946.353.790	46.477.719.000	46.107.395.301	-	-	162.371.131.000	147.053.749.091
511	Kab. Karimun	106.444.743.000	102.790.173.874	125.978.552.000	121.711.549.665	1.720.000.000	1.070.000.000	234.143.295.000	225.571.723.539
512	Kota Batam	36.980.948.000	27.872.252.899	363.734.327.000	349.911.119.202	-	-	400.715.275.000	377.783.372.101
513	Kota Tanjung Pinang	28.730.245.000	27.957.726.393	96.479.983.000	93.694.602.547	-	-	125.210.228.000	121.652.328.940
514	Kab. Lingga	56.218.159.000	54.751.149.440	85.411.823.000	82.330.027.348	1.600.000.000	1.280.000.000	143.229.982.000	138.361.176.788
515	Kab. Bintan	28.192.247.000	26.740.078.812	96.901.776.000	93.620.239.671	-	-	125.094.023.000	120.360.318.483
516	Provinsi Papua Barat	99.882.319.000	96.988.675.708	8.836.048.000	8.799.266.000	-	-	108.718.367.000	105.787.941.708
517	Kab. Fak Fak	102.819.285.000	101.638.056.848	84.869.354.000	81.386.586.317	-	-	187.688.639.000	183.024.643.165
518	Kab. Manokwari	149.460.915.000	144.654.139.498	140.593.715.000	138.367.171.153	600.000.000	-	290.654.630.000	283.021.310.651
519	Kab. Sorong	251.674.222.000	221.304.100.145	135.181.263.000	132.969.274.267	-	-	386.855.485.000	354.273.374.412
520	Kota Sorong	45.264.895.000	42.141.237.576	123.219.631.000	117.633.470.363	-	-	168.484.526.000	159.774.707.939
521	Kab. Raja Ampat	176.206.428.000	169.561.226.657	86.082.721.000	79.297.079.511	-	-	262.289.149.000	248.858.306.168
522	Kab. Sorong Selatan	144.521.870.000	143.705.270.738	83.551.876.000	82.957.443.500	-	-	228.073.746.000	226.662.714.238
523	Kab. Teluk Bintuni	104.936.007.000	99.952.567.688	76.292.074.000	68.915.147.303	-	-	181.228.081.000	168.867.714.991
524	Kab. Teluk Wondama	192.895.235.000	188.773.624.149	43.963.930.000	42.629.641.715	-	-	236.859.165.000	231.403.265.864
525	Kab. Kaimana	36.185.337.000	30.801.503.910	64.686.424.000	61.793.410.750	-	-	100.871.761.000	92.594.914.660
526	Kab. Maybrat	162.299.562.000	137.293.562.017	63.308.701.000	42.723.602.477	-	-	225.608.263.000	180.017.164.494
527	Kab. Tambrauw	173.681.488.000	170.583.064.280	42.626.484.000	42.078.367.834	-	-	216.307.972.000	212.661.432.114
528	Kab. Manokwari Selatan	77.661.764.000	77.085.480.400	36.948.793.000	35.993.861.173	-	-	114.610.557.000	113.079.341.573
529	Kab. Pegunungan Arfak	107.060.820.000	96.687.359.186	47.535.533.000	46.641.478.972	-	-	154.596.353.000	143.328.838.158
530	Provinsi Sulawesi Barat	339.736.586.000	308.579.832.429	200.081.736.000	198.991.871.941	-	-	539.818.322.000	507.571.704.370
531	Kab. Majene	80.134.213.000	78.097.585.458	124.235.810.000	124.224.478.110	2.160.000.000	1.002.000.000	206.530.023.000	203.324.063.568
532	Kab. Mamuju	147.140.767.000	145.064.625.180	159.349.060.000	158.372.835.739	3.842.000.000	3.767.000.000	310.331.827.000	307.204.460.919
533	Kab. Polewali Mandar	171.296.476.000	166.576.237.546	213.841.823.000	206.510.731.200	5.000.000.000	2.926.000.000	390.138.299.000	376.012.968.746
534	Kab. Mamasa	152.597.586.000	147.226.205.281	128.893.079.000	128.683.627.442	2.450.000.000	1.912.000.000	283.940.665.000	277.821.832.723
535	Kab. Pasangkayu	106.914.029.000	104.368.130.391	83.742.216.000	83.210.281.341	-	-	190.656.245.000	187.578.411.732
536	Kab. Mamuju Tengah	101.580.528.000	101.224.309.437	73.053.176.000	72.684.138.350	-	-	174.633.704.000	173.908.447.787
537	Provinsi Kalimantan Utara	178.798.835.000	169.325.171.177	107.093.522.000	106.150.747.219	-	-	285.892.357.000	275.475.918.396
538	Provinsi Papua Tengah	17.927.101.000	17.222.847.722	2.707.736.000	2.707.735.000	-	-	20.634.837.000	19.930.582.722
539	Provinsi Papua Selatan	48.196.739.000	42.310.431.045	1.437.560.000	1.437.543.500	-	-	49.634.299.000	43.747.974.545
540	Provinsi Papua Pegunungan	28.680.628.000	27.354.756.950	-	-	-	-	28.680.628.000	27.354.756.950
541	Provinsi Papua Barat Daya	85.662.101.000	-	6.153.147.000	1.488.356.223	-	-	91.815.248.000	1.488.356.223
542	Kab. Bulungan	73.360.355.000	69.270.694.032	97.486.725.000	96.407.097.320	-	-	170.847.080.000	165.677.791.352
543	Kab. Malinau	76.144.714.000	74.637.163.936	70.092.563.000	65.557.075.282	-	-	146.237.277.000	140.194.239.218
544	Kab. Nunukan	163.692.108.000	158.605.087.337	114.492.674.000	113.227.466.516	-	-	278.184.782.000	271.832.553.853
545	Kota Tarakan	28.850.493.000	28.567.452.502	93.445.783.000	88.816.772.050	3.000.000.000	3.000.000.000	125.296.276.000	120.384.224.552
546	Kab. Tana Tidung	33.344.008.000	30.709.657.008	24.906.106.000	22.740.915.974	-	-	58.250.114.000	53.450.572.982
Jumlah		53.422.463.835.000	50.334.741.347.305	130.214.110.762.000	128.081.947.190.309	3.467.335.746.000	2.940.874.059.627	187.103.910.343.000	181.357.562.597.241

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DID, DANA KEISTIMEWAAN DIY, DAN DANA DESA
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

	Daerah	Dana Desa		Insentif Fiskal		Otonomi Khusus Reguler		Otonomi Khusus Spesifik		tonomi Khusus Tambahan Infrastrukt		Otonomi Khusus Aceh		Otonmi Khusus Yogya		Total Pagu	Total Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
1	Provinsi Aceh	-	-	10.448.709.000	10.448.709.000	-	-	-	-	-	-	3.960.000.000.000	3.960.000.000.000	-	-	3.970.448.709.000	3.970.448.709.000
2	Kab. Aceh Barat	231.144.301.000	231.144.301.000	37.041.386.000	37.041.386.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268.185.687.000	268.185.687.000
3	Kab. Aceh Besar	438.344.305.000	437.492.408.200	9.597.631.000	4.798.815.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447.941.936.000	442.291.223.700
4	Kab. Aceh Selatan	202.793.203.000	202.793.203.000	15.183.417.000	15.183.417.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217.976.620.000	217.976.620.000
5	Kab. Aceh Singkil	96.032.347.000	96.032.347.000	15.570.019.000	15.570.019.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.602.366.000	111.602.366.000
6	Kab. Aceh Tengah	220.937.256.000	220.809.735.164	16.282.177.000	16.282.177.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237.219.433.000	237.091.912.164
7	Kab. Aceh Tenggara	280.385.494.000	280.160.798.400	12.882.330.000	12.882.330.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293.267.824.000	293.043.128.400
8	Kab. Aceh Timur	390.532.377.000	390.532.377.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390.532.377.000	390.532.377.000
9	Kab. Aceh Utara	639.443.820.000	639.061.446.128	11.402.579.000	11.402.579.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.846.399.000	650.464.025.128
10	Kab. Bireuen	461.692.051.000	461.692.050.000	23.228.989.000	23.228.989.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	484.921.040.000	484.921.039.000
11	Kab. Pidie	542.963.915.000	541.247.856.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542.963.915.000	541.247.856.400
12	Kab. Simeulue	105.754.010.000	105.738.659.999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.754.010.000	105.738.659.999
13	Kota Banda Aceh	76.172.967.000	76.172.967.000	5.781.382.000	5.781.382.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.954.349.000	81.954.349.000
14	Kota Sabang	15.539.645.000	15.539.645.000	35.206.620.000	35.206.620.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.746.265.000	50.746.265.000
15	Kota Langsa	58.500.728.000	58.499.724.540	16.299.407.000	16.299.407.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.800.135.000	74.799.131.540
16	Kota Lhokseumawe	61.827.136.000	61.401.253.255	5.730.566.000	5.730.566.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.557.702.000	67.131.819.255
17	Kab. Gayo Lues	109.847.539.000	109.847.539.000	20.875.605.000	20.875.605.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.723.144.000	130.723.144.000
18	Kab. Aceh Barat Daya	117.484.720.000	117.484.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.484.720.000	117.484.720.000
19	Kab. Aceh Jaya	126.437.618.000	126.437.618.000	28.217.028.000	28.217.028.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.654.646.000	154.654.646.000
20	Kab. Nagan Raya	172.044.337.000	172.000.868.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.044.337.000	172.000.868.700
21	Kab. Aceh Tamiang	172.162.914.000	171.848.441.900	5.955.668.000	5.955.668.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178.118.582.000	177.804.109.900
22	Kab. Bener Meriah	171.270.409.000	171.270.409.000	17.520.000.000	17.520.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188.790.409.000	188.790.409.000
23	Kab. Pidie Jaya	169.305.735.000	169.305.735.000	34.904.197.000	34.904.197.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204.209.932.000	204.209.932.000
24	Kota Subulussalam	69.260.845.000	69.260.845.000	23.878.854.000	23.878.854.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.139.699.000	93.139.699.000
25	Provinsi Sumatera Utara	-	-	29.555.902.000	29.555.902.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.555.902.000	29.555.902.000
26	Kab. Asahan	173.805.576.000	172.864.791.072	12.060.032.000	12.060.032.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.865.608.000	184.924.823.072
27	Kab. Dairi	136.102.721.000	135.230.180.200	33.666.172.000	33.666.172.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169.768.893.000	168.896.352.200
28	Kab. Deli Serdang	348.484.064.000	347.737.140.900	11.679.399.000	11.679.399.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.163.463.000	359.416.539.900
29	Kab. Karo	203.996.963.000	203.762.583.000	5.720.993.000	5.720.993.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209.717.956.000	209.483.576.000
30	Kab. Labuhanbatu	77.303.120.000	77.238.661.800	5.689.126.000	5.689.126.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.992.246.000	82.927.787.800
31	Kab. Langkat	243.323.463.000	242.184.832.050	11.717.546.000	5.858.773.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255.041.009.000	248.043.605.050
32	Kab. Mandailing Natal	304.614.216.000	303.959.196.060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304.614.216.000	303.959.196.060
33	Kab. Nias	147.262.254.000	147.262.254.000	25.772.677.000	25.772.677.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173.034.931.000	173.034.931.000
34	Kab. Simalungun	340.729.346.000	340.366.720.000	5.819.949.000	5.819.949.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346.549.295.000	346.186.669.000
35	Kab. Tapanuli Selatan	164.370.515.000	164.370.515.000	5.780.754.000	5.780.754.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.151.269.000	170.151.269.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	142.789.478.000	142.789.478.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142.789.478.000	142.789.478.000
37	Kab. Tapanuli Utara	198.733.682.000	198.733.682.000	10.824.467.000	10.824.467.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209.558.149.000	209.558.149.000
38	Kab. Toba Samosir	175.172.265.000	175.172.265.000	11.129.595.000	11.129.595.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186.301.860.000	186.301.860.000
39	Kota Binjai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Kota Medan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kota Pematang Siantar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Kota Sibolga	-	-	9.631.189.000	9.631.189.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.631.189.000	9.631.189.000
43	Kota Tanjung Balai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Kota Tebing Tinggi	-	-	11.456.003.000	11.456.003.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.456.003.000	11.456.003.000
45	Kota Padang Sidempuan	32.910.291.000	32.910.291.000	5.934.839.000	5.934.839.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.845.130.000	38.845.130.000
46	Kab. Pakpak Bharat	40.484.390.000	39.723.617.220	34.240.186.000	34.240.186.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.724.576.000	73.963.803.220
47	Kab. Nias Selatan	400.513.546.000	397.908.274.020	23.520.905.000	23.520.905.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424.034.451.000	421.429.179.020
48	Kab. Humbang Hasundutan	127.331.009.000	127.331.009.000	10.591.152.000	10.591.152.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137.922.161.000	137.922.161.000
49	Kab. Serdang Bedagai	207.121.432.000	205.897.856.795	11.970.689.000	11.970.689.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219.092.121.000	217.868.545.795
50	Kab. Samosir	101.652.622.000	101.652.622.000	5.780.929.000	5.780.929.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.433.551.000	107.433.551.000
51	Kab. Batu Bara	135.959.571.000	135.959.571.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.959.571.000	135.959.571.000
52	Kab. Padang Lawas	234.544.005.000	234.350.055.880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234.544.005.000	234.350.055.880
53	Kab. Padang Lawas Utara	294.200.497.000	290.697.938.465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294.200.497.000	290.697.938.465
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	59.337.613.000	59.337.613.000	16.994.463.000	16.994.463.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.332.076.000	76.332.076.000
55	Kab. Labuhanbatu Utara	89.718.201.000	89.370.339.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.718.201.000	89.370.339.400
56	Kab. Nias Utara	113.965.612.000	112.247.060.856	19.709.879.000	19.709.879.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.675.491.000	131.956.939.856
57	Kab. Nias Barat	98.450.982.000	95.642.748.627	22.463.593.000	22.463.593.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.914.575.000	118.106.341.627
58	Kota Gunungsitoli	85.970.533.000	85.859.661.318	25.589.523.000	25.589.523.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.560.056.000	111.449.184.318
59	Provinsi Sumatera Barat	-	-	8.621.025.000	8.621.025.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.621.025.000	8.621.025.000
60	Kab. Lima Puluh Kota	83.887.365.000	83.887.365.000	5.827.164.000	5.827.164.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.714.529.000	89.714.529.000
61	Kab. Agam	86.653.550.000	86.653.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.653.550.000	86.653.550.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	46.289.511.000	46.289.511.000	19.459.955.000	19.459.955.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.749.466.000	65.749.466.000
63	Kab. Padang Pariaman	101.544.125.000	101.544.125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.544.125.000	101.544.125.000
64	Kab. Pasaman	47.527.744.000	47.527.744.000	9.152.609.000	9.152.609.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.680.353.000	56.680.353.000
65	Kab. Pesisir Selatan	163.899.561.000	163.899.561.000	12.766.111.000	12.766.111.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.665.672.000	176.665.672.000
66	Kab. Sijunjung	62.381.021.000	61.883.611.800	11.780.311.000	11.780.311.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.161.332.000	73.663.922.800
67	Kab. Solok	80.311.190.000	80.024.193.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.311.190.000	80.024.193.600
68	Kab. Tanah Datar	74.105.465.000	74.105.465.000	18.941.225.000	18.941.225.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.046.690.000	93.046.690.000
69	Kota Bukit Tinggi	-	-	28.852.373.000	28.852.373.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.852.373.000	28.852.373.000
70	Kota Padang Panjang	-	-	9.492.819.000	9.492.819.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.492.819.000	9.492.819.000
71	Kota Padang	-	-	5.322.150.000	5.322.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.322.150.000	5.322.150.000
72	Kota Payakumbuh	-	-	46.963.381.000	46.963.381.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.963.381.000	46.963.381.000
73	Kota Sawahlunto	21.339.313.000	21.339.313.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.339.313.000	21.339.313.000
74	Kota Solok	-	-	20.752.894.000	20.752.894.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.752.894.000	20.752.894.000
75	Kota Pariaman	41.372.835.000	41.372.835.000	6.012.923.000	6.012.923.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.385.758.000	47.385.758.000
76	Kab. Pasaman Barat	34.974.531.000	34.974.531.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.974.531.000	34.974.531.000
77	Kab. Dharmasraya	54.485.661.000	54.485.661.000	8.601.217.000	8.601.217.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.086.878.000	63.086.878.000
78	Kab. Solok Selatan	41.852.235.000	41.852.235.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.852.235.000	41.852.235.000
79	Provinsi Riau	-	-	21.547.646.000	21.547.646.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.547.646.000	21.547.646.000
80	Kab. Bengkalis	130.489.453.000	129.623.338.071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.489.453.000	129.623.338.071
81	Kab. Indragiri Hilir	182.807.204.000	182.593.182.000	9.492.022.000	9.492.022.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.299.226.000	192.085.204.000
82	Kab. Indragiri Hulu	154.821.482.000	154.430.302.740	18.296.512.000	18.296.512.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173.117.994.000	172.726.814.740
83	Kab. Kampar	231.513.488.000	231.442.855.200	5.842.494.000	2.921.247.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237.355.982.000	234.364.102.200
84	Kab. Kuantan Singingi	178.241.335.000	177.944.592.236	10.661.040.000	10.661.040.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188.902.375.000	188.605.632.236
85	Kab. Pelalawan	101.795.169.000	101.503.434.900	10.712.519.000	10.712.519.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.507.688.000	112.215.953.900
86	Kab. Rokan Hilir	154.036.384.000	152.911.787.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.036.384.000	152.911.787.200

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DID, DANA KEISTIMEWAAN DIY, DAN DANA DESA
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

	Daerah	Dana Desa		Insentif Fiskal		Otonomi Khusus Reguler		Otonomi Khusus Spesifik		tonomi Khusus Tambahan Infrastrukt		Otonomi Khusus Aceh		Otonmi Khusus Yogya		Total Pagu	Total Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
87	Kab. Rokan Hulu	139.870.726.000	139.870.726.000	16.473.953.000	13.493.601.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156.344.679.000	153.364.327.500
88	Kab. Siak	115.395.616.000	115.395.616.000	16.236.941.000	16.236.941.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.632.557.000	131.632.557.000
89	Kota Dumai	-	-	46.474.391.000	46.474.391.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.474.391.000	46.474.391.000
90	Kota Pekanbaru	-	-	19.178.601.000	19.178.601.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.178.601.000	19.178.601.000
91	Kab. Kepulauan Meranti	98.715.145.000	98.162.430.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.715.145.000	98.162.430.900
92	Provinsi Jambi	-	-	8.710.271.000	8.710.271.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.710.271.000	8.710.271.000
93	Kab. Batanghari	99.657.256.000	99.657.256.000	11.899.348.000	11.899.348.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.556.604.000	111.556.604.000
94	Kab. Bungo	121.580.088.000	121.440.614.075	21.279.765.000	21.279.765.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142.859.853.000	142.720.379.075
95	Kab. Kerinci	215.515.355.000	211.607.903.840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215.515.355.000	211.607.903.840
96	Kab. Merangin	175.416.210.000	175.219.610.000	10.820.277.000	10.820.277.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186.236.487.000	186.039.887.000
97	Kab. Muaro Jambi	130.324.283.000	130.324.283.000	5.875.980.000	2.937.990.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136.200.263.000	133.262.273.000
98	Kab. Sarolangun	129.653.776.000	129.227.629.400	15.473.064.000	10.828.425.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.126.840.000	140.056.054.900
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	99.079.758.000	99.079.758.000	17.494.167.000	17.494.167.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.573.925.000	116.573.925.000
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	70.448.548.000	70.448.548.000	11.748.303.000	11.748.303.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.196.851.000	82.196.851.000
101	Kab. Tebo	101.057.374.000	101.057.360.476	11.552.444.000	11.552.444.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.609.818.000	112.609.804.476
102	Kota Jambi	-	-	5.918.541.000	5.918.541.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.918.541.000	5.918.541.000
103	Kota Sungai Penuh	49.566.439.000	49.394.385.788	10.400.931.000	10.400.931.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.967.370.000	59.795.316.788
104	Provinsi Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Kab. Lahat	288.962.116.000	288.155.980.800	6.250.658.000	6.250.658.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.212.774.000	294.406.638.800
106	Kab. Musi Banyuasin	227.506.520.000	227.448.129.600	23.878.101.000	23.878.101.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251.384.621.000	251.326.230.600
107	Kab. Musi Rawas	171.930.467.000	171.930.467.000	18.344.251.000	18.344.251.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.274.718.000	190.274.718.000
108	Kab. Muara Enim	222.280.494.000	222.027.045.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222.280.494.000	222.027.045.200
109	Kab. Ogan Komering Ilir	294.931.625.000	293.398.688.610	5.781.341.000	5.781.341.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.712.966.000	299.180.029.610
110	Kab. Ogan Komering Ulu	130.510.487.000	130.350.421.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.510.487.000	130.350.421.350
111	Kota Palembang	-	-	11.929.501.000	11.929.501.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.929.501.000	11.929.501.000
112	Kota Prabumulih	10.466.952.000	10.466.952.000	6.057.097.000	6.057.097.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.524.049.000	16.524.049.000
113	Kota Pagar Alam	-	-	42.519.633.000	42.519.633.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.519.633.000	42.519.633.000
114	Kota Lubuk Linggau	-	-	12.715.141.000	12.715.141.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.715.141.000	12.715.141.000
115	Kab. Banyuasin	274.230.612.000	274.230.612.000	15.138.527.000	10.411.510.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289.369.139.000	284.642.122.500
116	Kab. Ogan Ilir	197.126.540.000	197.126.540.000	15.450.437.000	15.450.437.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212.576.977.000	212.576.977.000
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	264.945.327.000	264.660.335.450	39.675.813.000	39.675.813.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304.621.140.000	304.336.148.450
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	215.750.657.000	215.732.217.880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215.750.657.000	215.732.217.880
119	Kab. Empat Lawang	129.032.263.000	129.032.263.000	5.960.565.000	5.960.565.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134.992.828.000	134.992.828.000
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	62.903.377.000	62.903.377.000	17.824.662.000	17.824.662.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.728.039.000	80.728.039.000
121	Kab. Musi Rawas Utara	81.841.303.000	81.841.303.000	33.341.579.000	33.341.579.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.182.882.000	115.182.882.000
122	Provinsi Bengkulu	-	-	11.760.417.000	11.760.417.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.760.417.000	11.760.417.000
123	Kab. Bengkulu Selatan	109.109.020.000	109.109.020.000	23.681.209.000	23.681.209.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.790.229.000	132.790.229.000
124	Kab. Bengkulu Utara	178.385.537.000	178.385.537.000	26.654.996.000	26.654.996.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.040.533.000	205.040.533.000
125	Kab. Rejang Lebong	106.625.521.000	106.107.340.700	5.758.419.000	5.758.419.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.383.940.000	111.865.759.700
126	Kota Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	Kab. Kaur	144.289.587.000	144.289.587.000	11.637.770.000	5.818.885.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155.927.357.000	150.108.472.000
128	Kab. Seluma	152.439.601.000	152.439.601.000	5.756.632.000	5.756.632.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.196.233.000	158.196.233.000
129	Kab. Mukomuko	121.700.396.000	121.650.874.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.700.396.000	121.650.874.700
130	Kab. Lebong	74.706.511.000	74.706.511.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.706.511.000	74.706.511.000
131	Kab. Kepahiang	85.223.796.000	85.034.005.600	13.289.870.000	13.289.870.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.513.666.000	98.323.875.600
132	Kab. Bengkulu Tengah	108.503.090.000	108.101.520.400	12.157.783.000	6.078.891.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.660.873.000	114.180.411.900
133	Provinsi Lampung	-	-	62.061.396.000	62.061.396.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.061.396.000	62.061.396.000
134	Kab. Lampung Barat	117.770.480.000	117.770.480.000	5.893.114.000	5.893.114.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.663.594.000	123.663.594.000
135	Kab. Lampung Selatan	257.544.305.000	257.544.305.000	18.530.209.000	18.530.209.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276.074.514.000	276.074.514.000
136	Kab. Lampung Tengah	319.165.415.000	319.165.415.000	5.823.982.000	2.911.991.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324.989.397.000	322.077.406.000
137	Kab. Lampung Utara	206.728.808.000	205.967.574.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.728.808.000	205.967.574.000
138	Kab. Lampung Timur	270.120.573.000	269.334.514.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.120.573.000	269.334.514.100
139	Kab. Tanggamus	266.239.725.000	265.278.346.509	5.801.127.000	5.801.127.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272.040.852.000	271.079.473.509
140	Kab. Tulang Bawang	133.796.609.000	133.796.609.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.796.609.000	133.796.609.000
141	Kab. Way Kanan	198.651.640.000	198.651.640.000	17.959.153.000	17.959.153.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216.610.793.000	216.610.793.000
142	Kota Bandar Lampung	-	-	5.480.252.000	5.480.252.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.480.252.000	5.480.252.000
143	Kota Metro	-	-	42.668.412.000	42.668.412.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.668.412.000	42.668.412.000
144	Kab. Pesawaran	141.548.213.000	141.548.213.000	11.612.178.000	11.612.178.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153.160.391.000	153.160.391.000
145	Kab. Pringsewu	119.943.820.000	119.943.820.000	22.932.206.000	22.932.206.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142.876.026.000	142.876.026.000
146	Kab. Mesuji	91.507.348.000	91.507.348.000	17.820.451.000	17.820.451.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.327.799.000	109.327.799.000
147	Kab. Tulang Bawang Barat	85.992.086.000	85.992.086.000	17.624.906.000	17.624.906.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.616.992.000	103.616.992.000
148	Kab. Pesisir Barat	94.625.929.000	94.625.929.000	21.751.813.000	21.751.813.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.377.742.000	116.377.742.000
149	Provinsi DKI Jakarta	-	-	35.175.027.000	35.175.027.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.175.027.000	35.175.027.000
150	Provinsi Jawa Barat	-	-	12.083.189.000	12.083.189.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.083.189.000	12.083.189.000
151	Kab. Bandung	374.110.324.000	369.782.772.050	36.149.309.000	36.149.309.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410.259.633.000	405.932.081.050
152	Kab. Bekasi	258.721.797.000	256.985.104.000	22.341.836.000	22.341.836.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281.063.633.000	279.326.940.000
153	Kab. Bogor	600.457.783.000	596.200.171.850	5.913.447.000	5.913.447.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606.371.230.000	602.113.618.850
154	Kab. Ciamis	266.526.909.000	266.526.909.000	25.246.589.000	25.246.589.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291.773.498.000	291.773.498.000
155	Kab. Cianjur	451.832.504.000	450.588.614.940	11.322.950.000	11.322.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	463.155.454.000	461.911.564.940
156	Kab. Cirebon	466.030.971.000	465.063.547.000	12.141.743.000	12.141.743.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478.172.714.000	477.205.290.000
157	Kab. Garut	491.630.024.000	491.220.881.700	45.402.419.000	45.402.419.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	537.032.443.000	536.623.300.700
158	Kab. Indramayu	349.840.577.000	349.840.577.000	6.128.894.000	6.128.894.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355.969.471.000	355.969.471.000
159	Kab. Karawang	352.304.937.000	352.304.937.000	5.720.980.000	5.720.980.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358.025.917.000	358.025.917.000
160	Kab. Kuningan	352.599.938.000	352.599.938.000	12.942.270.000	12.942.270.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365.542.208.000	365.542.208.000
161	Kab. Majalengka	328.530.155.000	328.530.155.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328.530.155.000	328.530.155.000
162	Kab. Purwakarta	190.608.244.000	190.526.939.200	5.763.374.000	5.763.374.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.371.618.000	196.290.313.200
163	Kab. Subang	280.609.986.000	280.609.986.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.609.986.000	280.609.986.000
164	Kab. Sukabumi	446.761.470.000	446.761.470.000	11.838.424.000	11.838.424.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	458.599.894.000	458.599.894.000
165	Kab. Sumedang	277.448.813.000	277.350.642.100	12.018.294.000	12.018.294.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289.467.107.000	289.368.936.100
166	Kab. Tasikmalaya	400.851.143.000	399.737.802.700	11.645.735.000	11.645.735.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	412.496.878.000	411.383.537.700
167	Kota Bandung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	Kota Bekasi	-	-	12.371.319.000	6.185.659.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.371.319.000	6.185.659.500
169	Kota Bogor	-	-	5.912.254.000	5.912.254.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.912.254.000	5.912.254.000
170	Kota Cirebon	-	-	12.674.059.000	12.674.059.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.674.059.000	12.674.059.000
171	Kota Depok	-	-	36.723.423.000	36.723.423.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.723.423.000	36.723.423.000
172	Kota Sukabumi	-	-	18.439.215.000	18.439.215.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.439.215.000	18.439.215.000
173	Kota Tasikmalaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DID, DANA KEISTIMEWAAN DIY, DAN DANA DESA
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

	Daerah	Dana Desa		Insentif Fiskal		Otonomi Khusus Reguler		Otonomi Khusus Spesifik		tonomi Khusus Tambahan Infrastrukt		Otonomi Khusus Aceh		Otonmi Khusus Yogya		Total Pagu	Total Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
174	Kota Cimahi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	Kota Banjar	17.915.401.000	17.915.401.000	11.628.278.000	11.628.278.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.543.679.000	29.543.679.000
176	Kab. Bandung Barat	242.697.615.000	242.697.615.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242.697.615.000	242.697.615.000
177	Kab. Pangandaran	97.811.463.000	97.251.765.650	34.866.264.000	34.866.264.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.677.727.000	132.118.029.650
178	Provinsi Jawa Tengah	-	-	87.197.945.000	87.197.945.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.197.945.000	87.197.945.000
179	Kab. Banjarnegara	285.008.401.000	285.008.401.000	18.150.156.000	18.150.156.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303.158.557.000	303.158.557.000
180	Kab. Banyumas	354.692.218.000	354.692.218.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354.692.218.000	354.692.218.000
181	Kab. Batang	223.279.438.000	223.279.438.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223.279.438.000	223.279.438.000
182	Kab. Blora	265.281.497.000	265.281.497.000	23.405.854.000	23.405.854.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288.687.351.000	288.687.351.000
183	Kab. Boyolali	265.842.691.000	265.842.691.000	27.301.163.000	27.301.163.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293.143.854.000	293.143.854.000
184	Kab. Brebes	336.053.271.000	334.083.744.600	5.837.859.000	5.837.859.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341.891.130.000	339.921.603.600
185	Kab. Cilacap	329.132.081.000	328.544.506.300	5.897.922.000	5.897.922.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335.030.003.000	334.442.428.300
186	Kab. Demak	262.545.878.000	262.545.878.000	31.244.228.000	31.244.228.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293.790.106.000	293.790.106.000
187	Kab. Grobogan	311.445.783.000	311.445.783.000	23.366.776.000	23.366.776.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334.812.559.000	334.812.559.000
188	Kab. Jepara	212.555.731.000	212.555.731.000	43.465.414.000	43.465.414.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256.021.145.000	256.021.145.000
189	Kab. Karanganyar	180.205.977.000	180.205.977.000	11.781.767.000	5.890.883.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191.987.744.000	186.096.860.500
190	Kab. Kebumen	456.284.228.000	455.959.893.200	11.805.728.000	11.805.728.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	468.089.956.000	467.765.621.200
191	Kab. Kendal	261.689.220.000	261.152.593.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261.689.220.000	261.152.593.800
192	Kab. Klaten	380.301.846.000	380.301.846.000	11.882.483.000	11.882.483.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392.184.329.000	392.184.329.000
193	Kab. Kudus	136.746.086.000	136.746.086.000	13.267.148.000	13.267.148.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.013.234.000	150.013.234.000
194	Kab. Magelang	363.989.464.000	363.989.464.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363.989.464.000	363.989.464.000
195	Kab. Pati	383.737.678.000	382.478.377.000	16.828.112.000	16.828.112.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.565.790.000	399.306.489.000
196	Kab. Pekalongan	264.941.286.000	264.899.843.000	29.255.354.000	29.255.354.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294.196.640.000	294.155.197.000
197	Kab. Pemalang	261.276.815.000	261.275.195.760	6.635.557.000	6.635.557.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267.912.372.000	267.910.752.760
198	Kab. Purbalingga	254.557.923.000	254.557.923.000	12.201.947.000	12.201.947.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266.759.870.000	266.759.870.000
199	Kab. Purworejo	384.401.231.000	384.401.231.000	31.653.321.000	31.653.321.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416.054.552.000	416.054.552.000
200	Kab. Rembang	248.448.063.000	248.448.063.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248.448.063.000	248.448.063.000
201	Kab. Semarang	205.979.019.000	205.979.019.000	5.900.646.000	5.900.646.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211.879.665.000	211.879.665.000
202	Kab. Sragen	213.713.479.000	213.713.479.000	23.002.021.000	23.002.021.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236.715.500.000	236.715.500.000
203	Kab. Sukoharjo	161.172.763.000	161.172.763.000	16.326.997.000	16.326.997.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177.499.760.000	177.499.760.000
204	Kab. Tegal	308.281.385.000	307.953.560.600	5.841.384.000	5.841.384.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314.122.769.000	313.794.944.600
205	Kab. Temanggung	242.462.582.000	242.462.582.000	29.383.259.000	29.383.259.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271.845.841.000	271.845.841.000
206	Kab. Wonogiri	259.415.528.000	259.415.528.000	50.051.001.000	50.051.001.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309.466.529.000	309.466.529.000
207	Kab. Wonosobo	247.153.737.000	247.153.737.000	13.020.711.000	13.020.711.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.174.448.000	260.174.448.000
208	Kota Magelang	-	-	52.522.739.000	52.522.739.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.522.739.000	52.522.739.000
209	Kota Pekalongan	-	-	21.278.579.000	21.278.579.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.278.579.000	21.278.579.000
210	Kota Salatiga	-	-	49.138.845.000	49.138.845.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.138.845.000	49.138.845.000
211	Kota Semarang	-	-	14.615.779.000	14.615.779.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.615.779.000	14.615.779.000
212	Kota Surakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	Kota Tegal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	Provinsi DI Yogyakarta	-	-	80.876.155.000	80.876.155.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.420.000.000.000	1.372.725.809.224	1.500.876.155.000	1.453.601.964.224
215	Kab. Bantul	126.479.025.000	126.479.025.000	58.809.566.000	58.809.566.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.288.591.000	185.288.591.000
216	Kab. Gunung Kidul	179.933.551.000	179.933.551.000	5.952.497.000	5.952.497.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.886.048.000	185.886.048.000
217	Kab. Kulon Progo	104.694.668.000	104.694.668.000	54.259.365.000	54.259.365.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.954.033.000	158.954.033.000
218	Kab. Sleman	124.417.337.000	124.203.563.500	48.593.705.000	48.593.705.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173.011.042.000	172.797.268.500
219	Kota Yogyakarta	-	-	82.504.747.000	82.504.747.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.504.747.000	82.504.747.000
220	Provinsi Jawa Timur	-	-	74.998.750.000	71.891.089.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.998.750.000	71.891.089.000
221	Kab. Bangkalan	310.628.712.000	310.628.711.997	6.037.277.000	6.037.277.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316.665.989.000	316.665.988.997
222	Kab. Banyuwangi	229.423.419.000	229.305.443.700	53.412.589.000	53.412.589.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282.836.008.000	282.718.032.700
223	Kab. Blitar	234.905.666.000	234.905.666.000	28.489.581.000	28.489.581.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263.395.247.000	263.395.247.000
224	Kab. Bojonegoro	407.133.690.000	406.556.846.275	11.524.031.000	11.524.031.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	418.657.721.000	418.080.877.275
225	Kab. Bondowoso	224.397.404.000	224.397.404.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224.397.404.000	224.397.404.000
226	Kab. Gresik	318.788.865.000	318.788.865.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318.788.865.000	318.788.865.000
227	Kab. Jember	324.091.415.000	322.996.582.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324.091.415.000	322.996.582.400
228	Kab. Jombang	315.572.884.000	315.572.884.000	19.475.868.000	19.475.868.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335.048.752.000	335.048.752.000
229	Kab. Kediri	381.602.679.000	381.287.893.345	5.700.953.000	5.700.953.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387.303.632.000	386.988.846.345
230	Kab. Lamongan	419.493.131.000	419.493.131.000	42.914.751.000	42.914.751.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	462.407.882.000	462.407.882.000
231	Kab. Lumajang	218.497.691.000	218.497.691.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218.497.691.000	218.497.691.000
232	Kab. Madiun	196.676.956.000	196.676.956.000	6.099.626.000	6.099.626.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202.776.582.000	202.776.582.000
233	Kab. Magetan	191.794.890.000	191.794.890.000	39.969.879.000	39.969.879.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231.764.769.000	231.764.769.000
234	Kab. Malang	462.622.095.000	462.622.095.000	22.916.865.000	22.916.865.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485.538.960.000	485.538.960.000
235	Kab. Mojokerto	294.800.336.000	294.196.059.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294.800.336.000	294.196.059.900
236	Kab. Nganjuk	271.544.816.000	271.045.569.200	5.823.334.000	5.823.334.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277.368.150.000	276.868.903.200
237	Kab. Ngawi	235.855.938.000	235.855.938.000	5.887.334.000	5.887.334.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241.743.272.000	241.743.272.000
238	Kab. Pacitan	171.988.044.000	171.988.044.000	5.942.102.000	5.942.102.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177.930.146.000	177.930.146.000
239	Kab. Pamekasan	202.286.998.000	202.286.998.000	5.589.509.000	5.589.509.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207.876.507.000	207.876.507.000
240	Kab. Pasuruan	351.002.916.000	349.825.662.500	11.644.350.000	11.644.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362.647.266.000	361.470.012.500
241	Kab. Ponorogo	263.442.388.000	263.442.388.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263.442.388.000	263.442.388.000
242	Kab. Probolinggo	344.672.757.000	344.672.757.000	6.019.863.000	6.019.863.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.692.620.000	350.692.620.000
243	Kab. Sampang	228.702.990.000	228.702.990.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228.702.990.000	228.702.990.000
244	Kab. Sidoarjo	323.575.176.000	322.178.934.000	21.357.443.000	21.357.443.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344.932.619.000	343.536.377.000
245	Kab. Situbondo	151.550.954.000	150.869.238.300	5.399.419.000	5.399.419.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156.950.373.000	156.268.657.300
246	Kab. Sumenep	359.620.929.000	359.620.929.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359.620.929.000	359.620.929.000
247	Kab. Trenggalek	165.882.571.000	165.882.571.000	42.011.238.000	42.011.238.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207.893.809.000	207.893.809.000
248	Kab. Tuban	307.479.416.000	306.929.122.900	6.111.031.000	6.111.031.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313.590.447.000	313.040.153.900
249	Kab. Tulungagung	251.734.117.000	251.734.117.000	6.225.400.000	6.225.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257.959.517.000	257.959.517.000
250	Kota Blitar	-	-	53.546.779.000	53.546.779.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.546.779.000	53.546.779.000
251	Kota Kediri	-	-	6.772.434.000	6.772.434.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.772.434.000	6.772.434.000
252	Kota Madiun	-	-	74.714.922.000	74.714.922.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.714.922.000	74.714.922.000
253	Kota Malang	-	-	22.160.938.000	22.160.938.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.160.938.000	22.160.938.000
254	Kota Mojokerto	-	-	36.545.526.000	36.545.526.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.545.526.000	36.545.526.000
255	Kota Pasuruan	-	-	15.680.060.000	15.680.060.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.680.060.000	15.680.060.000
256	Kota Probolinggo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
257	Kota Surabaya	-	-	30.523.723.000	30.523.723.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.523.723.000	30.523.723.000
258	Kota Batu	20.668.338.000	20.668.338.000	38.774.970.000	38.774.970.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.443.308.000	59.443.308.000
259	Provinsi Kalimantan Barat	-	-	6.199.742.000	6.199.742.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.199.742.000	6.199.742.000
260	Kab. Bengkayang	110.069.022.000	110.069.022.000	10.605.976.000	10.605.976.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.674.998.000	120.674.998.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DID, DANA KEISTIMEWAAN DIY, DAN DANA DESA
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

	Daerah	Dana Desa		Insentif Fiskal		Otonomi Khusus Reguler		Otonomi Khusus Spesifik		tonomi Khusus Tambahan Infrastrukt		Otonomi Khusus Aceh		Otonmi Khusus Yogya		Total Pagu	Total Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
261	Kab. Landak	155.614.525.000	155.614.525.000	14.956.842.000	14.956.842.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.571.367.000	170.571.367.000
262	Kab. Kapuas Hulu	249.312.543.000	248.770.492.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249.312.543.000	248.770.492.800
263	Kab. Ketapang	254.355.241.000	253.420.738.150	6.103.901.000	6.103.901.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.459.142.000	259.524.639.150
264	Kab. Mempawah	61.127.714.000	61.127.714.000	5.438.024.000	5.438.024.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.565.738.000	66.565.738.000
265	Kab. Sambas	184.385.908.000	184.385.908.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.385.908.000	184.385.908.000
266	Kab. Sanggau	158.943.858.000	157.083.453.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.943.858.000	157.083.453.900
267	Kab. Sintang	342.149.842.000	341.667.038.870	26.486.795.000	26.486.795.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368.636.637.000	368.153.833.870
268	Kota Pontianak	-	-	12.840.204.000	12.840.204.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.840.204.000	12.840.204.000
269	Kota Singkawang	-	-	14.810.529.000	14.810.529.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.810.529.000	14.810.529.000
270	Kab. Sekadau	82.979.130.000	82.979.130.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.979.130.000	82.979.130.000
271	Kab. Melawi	152.772.193.000	152.772.193.000	16.860.579.000	16.860.579.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169.632.772.000	169.632.772.000
272	Kab. Kayong Utara	44.348.639.000	43.968.061.563	9.943.767.000	9.943.767.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.292.406.000	53.911.828.563
273	Kab. Kubu Raya	119.825.511.000	119.199.655.800	12.362.633.000	12.362.633.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.188.144.000	131.562.288.800
274	Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	38.617.660.000	38.617.660.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.617.660.000	38.617.660.000
275	Kab. Barito Selatan	73.521.503.000	72.180.332.350	5.649.265.000	2.824.632.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.170.768.000	75.004.964.850
276	Kab. Barito Utara	77.192.059.000	76.583.107.000	5.794.231.000	5.794.231.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.986.290.000	82.377.338.000
277	Kab. Kapuas	186.839.748.000	186.839.388.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186.839.748.000	186.839.388.000
278	Kab. Kotawaringin Barat	75.749.087.000	75.749.087.000	17.333.161.000	17.333.161.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.082.248.000	93.082.248.000
279	Kab. Kotawaringin Timur	153.858.559.000	153.858.559.000	22.293.407.000	22.293.407.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.151.966.000	176.151.966.000
280	Kota Palangkaraya	-	-	6.598.785.000	6.598.785.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.598.785.000	6.598.785.000
281	Kab. Katingan	135.105.046.000	135.105.046.000	6.264.924.000	6.264.924.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141.369.970.000	141.369.970.000
282	Kab. Seruyan	94.487.656.000	94.487.656.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.487.656.000	94.487.656.000
283	Kab. Sukamara	26.472.195.000	26.472.195.000	10.019.416.000	10.019.416.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.491.611.000	36.491.611.000
284	Kab. Lamandau	68.082.862.000	68.082.862.000	10.378.377.000	10.378.377.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.461.239.000	78.461.239.000
285	Kab. Gunung Mas	95.278.770.000	95.043.161.190	15.456.199.000	15.456.199.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.734.969.000	110.499.360.190
286	Kab. Pulang Pisau	81.340.442.000	81.340.442.000	26.777.560.000	26.777.560.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.118.002.000	108.118.002.000
287	Kab. Murung Raya	110.859.253.000	110.859.253.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.859.253.000	110.859.253.000
288	Kab. Barito Timur	78.467.043.000	77.935.147.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.467.043.000	77.935.147.800
289	Provinsi Kalimantan Selatan	-	-	47.059.823.000	47.059.823.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.059.823.000	47.059.823.000
290	Kab. Banjar	222.580.763.000	222.580.763.000	5.672.424.000	5.672.424.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228.253.187.000	228.253.187.000
291	Kab. Barito Kuala	155.015.700.000	155.015.700.000	5.792.351.000	5.792.351.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.808.051.000	160.808.051.000
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	111.423.331.000	111.423.331.000	39.043.184.000	39.043.184.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.466.515.000	150.466.515.000
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	127.021.976.000	127.021.976.000	5.743.384.000	5.743.384.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.765.360.000	132.765.360.000
294	Kab. Hulu Sungai Utara	160.624.668.000	160.337.302.285	12.297.367.000	12.297.367.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.922.035.000	172.634.669.285
295	Kab. Kotabaru	167.208.742.000	167.208.742.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167.208.742.000	167.208.742.000
296	Kab. Tabalong	101.081.537.000	101.081.537.000	42.449.877.000	42.449.877.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.531.414.000	143.531.414.000
297	Kab. Tanah Laut	112.923.793.000	112.845.982.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.923.793.000	112.845.982.320
298	Kab. Tapin	97.203.620.000	97.150.986.586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.203.620.000	97.150.986.586
299	Kota Banjarbaru	-	-	28.796.644.000	28.796.644.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.796.644.000	28.796.644.000
300	Kota Banjarmasin	-	-	34.356.178.000	34.356.178.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.356.178.000	34.356.178.000
301	Kab. Balangan	113.304.657.000	112.897.928.300	16.166.958.000	16.166.958.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.471.615.000	129.064.886.300
302	Kab. Tanah Bumbu	122.424.918.000	122.424.918.000	18.608.839.000	18.608.839.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141.033.757.000	141.033.757.000
303	Provinsi Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	Kab. Berau	93.677.389.000	93.677.389.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.677.389.000	93.677.389.000
305	Kab. Kutai Kartanegara	192.420.471.000	192.420.471.000	27.486.716.000	27.486.716.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219.907.187.000	219.907.187.000
306	Kab. Kutai Barat	162.209.439.000	162.209.439.000	5.834.115.000	5.834.115.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168.043.554.000	168.043.554.000
307	Kab. Kutai Timur	148.693.080.000	146.660.086.500	9.306.588.000	9.306.588.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157.999.668.000	155.966.674.500
308	Kab. Paser	122.311.394.000	120.380.001.400	21.562.638.000	21.562.638.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.874.032.000	141.942.639.400
309	Kota Balikpapan	-	-	44.626.047.000	41.601.904.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.626.047.000	41.601.904.000
310	Kota Bontang	-	-	16.446.800.000	16.446.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.446.800.000	16.446.800.000
311	Kota Samarinda	-	-	16.333.666.000	16.333.666.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.333.666.000	16.333.666.000
312	Kab. Penajam Paser Utara	29.452.924.000	29.452.924.000	5.913.954.000	5.913.954.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.366.878.000	35.366.878.000
313	Kab. Mahakam Ulu	52.633.910.000	48.260.654.012	10.599.493.000	10.599.493.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.233.403.000	58.860.147.012
314	Provinsi Sulawesi Utara	-	-	33.579.296.000	33.579.296.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.579.296.000	33.579.296.000
315	Kab. Bolaang Mongondow	152.964.788.000	152.964.788.000	14.914.122.000	14.914.122.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167.878.910.000	167.878.910.000
316	Kab. Minahasa	174.085.342.000	174.085.342.000	10.478.235.000	10.478.235.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.563.577.000	184.563.577.000
317	Kab. Sangihe	107.731.208.000	107.491.407.902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.731.208.000	107.491.407.902
318	Kota Bitung	-	-	24.376.556.000	24.376.556.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.376.556.000	24.376.556.000
319	Kota Manado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	Kab. Kepulauan Talaud	106.419.433.000	106.419.433.000	16.532.445.000	16.532.445.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.951.878.000	122.951.878.000
321	Kab. Minahasa Selatan	127.606.962.000	127.606.962.000	19.518.880.000	19.518.880.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147.125.842.000	147.125.842.000
322	Kota Tomohon	-	-	20.353.343.000	20.353.343.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.353.343.000	20.353.343.000
323	Kab. Minahasa Utara	98.656.525.000	98.526.285.276	15.385.759.000	15.385.759.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.042.284.000	113.912.044.276
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	61.234.795.000	61.234.795.000	16.371.034.000	16.371.034.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.605.829.000	77.605.829.000
325	Kota Kotamobagu	13.009.817.000	13.009.817.000	5.807.022.000	5.807.022.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.816.839.000	18.816.839.000
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	78.926.577.000	78.926.577.000	5.890.177.000	5.890.177.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.816.754.000	84.816.754.000
327	Kab. Minahasa Tenggara	101.168.768.000	99.269.669.000	10.399.061.000	10.399.061.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.567.829.000	109.668.730.000
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	61.170.584.000	61.170.584.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.170.584.000	61.170.584.000
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	61.905.121.000	61.905.121.000	6.313.683.000	6.313.683.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.218.804.000	68.218.804.000
330	Provinsi Sulawesi Tengah	-	-	11.207.331.000	5.603.665.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.207.331.000	5.603.665.500
331	Kab. Banggai	227.030.227.000	227.030.227.000	20.281.195.000	20.281.195.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247.311.422.000	247.311.422.000
332	Kab. Banggai Kepulauan	111.415.896.000	111.415.896.000	5.734.069.000	5.734.069.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.149.965.000	117.149.965.000
333	Kab. Buol	91.419.056.000	91.419.056.000	11.905.188.000	11.905.188.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.324.244.000	103.324.244.000
334	Kab. Tolitoli	93.090.125.000	93.090.125.000	5.802.208.000	5.802.208.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.892.333.000	98.892.333.000
335	Kab. Donggala	143.590.649.000	143.271.351.604	14.542.879.000	14.542.879.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.133.528.000	157.814.230.604
336	Kab. Morowali	106.060.297.000	104.761.178.944	42.497.206.000	42.497.206.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148.557.503.000	147.258.384.944
337	Kab. Poso	120.893.347.000	120.893.347.000	10.479.181.000	10.479.181.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.372.528.000	131.372.528.000
338	Kota Palu	-	-	5.674.436.000	5.674.436.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.674.436.000	5.674.436.000
339	Kab. Parigi Moutong	241.374.897.000	241.123.454.500	9.429.858.000	9.429.858.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.804.755.000	250.553.312.500
340	Kab. Tojo Una Una	114.710.250.000	114.710.250.000	49.620.369.000	49.620.369.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164.330.619.000	164.330.619.000
341	Kab. Sigi	152.166.403.000	152.166.403.000	27.805.695.000	27.805.695.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179.972.098.000	179.972.098.000
342	Kab. Banggai Laut	51.543.223.000	51.097.994.750	6.215.496.000	6.215.496.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.758.719.000	57.313.490.750
343	Kab. Morowali Utara	110.554.350.000	110.554.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.554.350.000	110.554.350.000
344	Provinsi Sulawesi Selatan	-	-	71.472.744.000	71.472.744.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.472.744.000	71.472.744.000
345	Kab. Bantaeng	41.310.806.000	41.310.806.000	17.047.140.000	17.047.140.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.357.946.000	58.357.946.000
346	Kab. Barru	38.739.622.000	38.739.622.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.739.622.000	38.739.622.000
347	Kab. Bone	288.456.019.000	287.820.801.350	13.308.076.000	13.308.076.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301.764.095.000	301.128.877.350

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DID, DANA KEISTIMEWAAN DIY, DAN DANA DESA
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

	Daerah	Dana Desa		Insentif Fiskal		Otonomi Khusus Reguler		Otonomi Khusus Spesifik		tonomi Khusus Tambahan Infrastrukt		Otonomi Khusus Aceh		Otonmi Khusus Yogya		Total Pagu	Total Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
348	Kab. Bulukumba	99.409.927.000	99.064.338.200	10.377.309.000	10.377.309.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.787.236.000	109.441.647.200
349	Kab. Enrekang	96.923.567.000	96.923.567.000	15.625.741.000	15.625.741.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.549.308.000	112.549.308.000
350	Kab. Gowa	117.841.449.000	117.841.448.307	23.405.120.000	23.405.120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141.246.569.000	141.246.568.307
351	Kab. Jeneponto	83.009.224.000	82.197.107.200	6.569.635.000	6.569.635.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.578.859.000	88.766.742.200
352	Kab. Luwu	179.315.608.000	179.315.608.000	26.515.937.000	26.515.937.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.831.545.000	205.831.545.000
353	Kab. Luwu Utara	153.576.765.000	153.576.765.000	12.444.883.000	12.444.883.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166.021.648.000	166.021.648.000
354	Kab. Maros	78.490.716.000	78.490.716.000	17.659.868.000	17.659.868.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.150.584.000	96.150.584.000
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	65.102.178.000	65.102.177.990	17.797.293.000	17.797.293.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.899.471.000	82.899.470.990
356	Kota Palopo	-	-	5.930.155.000	5.930.155.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.930.155.000	5.930.155.000
357	Kab. Luwu Timur	110.838.130.000	110.838.130.000	11.794.502.000	11.794.502.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.632.632.000	122.632.632.000
358	Kab. Pinrang	69.972.168.000	69.961.304.300	16.484.913.000	16.484.913.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.457.081.000	86.446.217.300
359	Kab. Sinjai	62.931.678.000	62.931.678.000	13.957.880.000	13.957.880.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.889.558.000	76.889.558.000
360	Kab. Kepulauan Selayar	68.245.693.000	68.245.693.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.245.693.000	68.245.693.000
361	Kab. Sidenreng Rappang	60.898.941.000	60.898.941.000	20.900.516.000	20.900.516.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.799.457.000	81.799.457.000
362	Kab. Soppeng	46.704.934.000	46.704.934.000	11.649.633.000	11.649.633.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.354.567.000	58.354.567.000
363	Kab. Takalar	67.993.500.000	67.993.500.000	5.740.914.000	5.740.914.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.734.414.000	73.734.414.000
364	Kab. Tana Toraja	104.378.742.000	104.378.742.000	21.071.841.000	21.071.841.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.450.583.000	125.450.583.000
365	Kab. Wajo	119.082.791.000	119.082.791.000	31.670.716.000	31.670.716.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.753.507.000	150.753.507.000
366	Kota Parepare	-	-	28.262.493.000	28.262.493.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.262.493.000	28.262.493.000
367	Kota Makassar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	Kab. Toraja Utara	100.570.285.000	100.570.285.000	5.959.771.000	2.979.885.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.530.056.000	103.550.170.500
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
370	Kab. Buton	65.228.972.000	65.035.538.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.228.972.000	65.035.538.800
371	Kab. Konawe	218.978.282.000	218.978.282.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218.978.282.000	218.978.282.000
372	Kab. Kolaka	81.736.884.000	81.488.233.105	15.767.840.000	15.767.840.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.504.724.000	97.256.073.105
373	Kab. Muna	104.930.863.000	104.930.863.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.930.863.000	104.930.863.000
374	Kota Kendari	-	-	17.095.535.000	17.095.535.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.095.535.000	17.095.535.000
375	Kota Bau-bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
376	Kab. Konawe Selatan	264.295.359.000	264.295.359.000	9.383.684.000	9.383.684.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273.679.043.000	273.679.043.000
377	Kab. Bombana	97.776.291.000	97.776.291.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.776.291.000	97.776.291.000
378	Kab. Wakatobi	61.640.608.000	61.640.608.000	5.947.093.000	5.947.093.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.587.701.000	67.587.701.000
379	Kab. Kolaka Utara	107.186.212.000	107.186.190.850	22.186.038.000	22.186.038.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.372.250.000	129.372.228.850
380	Kab. Konawe Utara	119.400.224.000	119.400.224.000	15.181.018.000	15.181.018.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134.581.242.000	134.581.242.000
381	Kab. Buton Utara	61.116.609.000	61.116.609.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.116.609.000	61.116.609.000
382	Kab. Konawe Kepulauan	65.129.304.000	65.129.304.000	11.754.042.000	11.754.042.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.883.346.000	76.883.346.000
383	Kab. Kolaka Timur	92.708.644.000	92.708.644.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.708.644.000	92.708.644.000
384	Kab. Muna Barat	66.015.798.000	66.015.798.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.015.798.000	66.015.798.000
385	Kab. Buton Tengah	56.546.729.000	56.546.729.000	5.795.324.000	5.795.324.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.342.053.000	62.342.053.000
386	Kab. Buton Selatan	50.215.599.000	50.215.599.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.215.599.000	50.215.599.000
387	Provinsi Bali	-	-	67.892.976.000	67.892.976.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.892.976.000	67.892.976.000
388	Kab. Badung	48.109.940.000	47.887.856.200	59.373.863.000	59.373.863.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.483.803.000	107.261.719.200
389	Kab. Bangli	60.083.252.000	60.083.252.000	30.884.546.000	30.884.546.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.967.798.000	90.967.798.000
390	Kab. Buleleng	132.727.227.000	132.727.227.000	37.499.147.000	37.499.147.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.226.374.000	170.226.374.000
391	Kab. Gianyar	68.054.916.000	68.054.916.000	10.490.443.000	10.490.443.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.545.359.000	78.545.359.000
392	Kab. Jembrana	42.554.456.000	42.554.456.000	33.830.584.000	33.830.584.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.385.040.000	76.385.040.000
393	Kab. Karangasem	79.383.744.000	79.383.744.000	21.860.366.000	21.860.366.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.244.110.000	101.244.110.000
394	Kab. Klungkung	47.843.257.000	47.843.257.000	25.474.546.000	25.474.546.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.317.803.000	73.317.803.000
395	Kab. Tabanan	117.628.512.000	117.628.512.000	5.960.430.000	5.960.430.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.588.942.000	123.588.942.000
396	Kota Denpasar	33.881.756.000	33.881.756.000	53.953.685.000	53.953.685.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.835.441.000	87.835.441.000
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
398	Kab. Bima	190.157.200.000	190.157.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.157.200.000	190.157.200.000
399	Kab. Dompu	71.658.985.000	71.658.985.000	11.702.980.000	11.702.980.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.361.965.000	83.361.965.000
400	Kab. Lombok Barat	143.291.094.000	143.291.094.000	6.193.142.000	6.193.142.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.484.236.000	149.484.236.000
401	Kab. Lombok Tengah	166.892.819.000	166.892.819.000	5.734.038.000	5.734.038.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.626.857.000	172.626.857.000
402	Kab. Lombok Timur	284.586.185.000	284.288.270.989	5.860.379.000	5.860.379.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290.446.564.000	290.148.649.989
403	Kab. Sumbawa	152.202.830.000	152.202.830.000	11.447.687.000	11.447.687.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163.650.517.000	163.650.517.000
404	Kota Mataram	-	-	50.129.084.000	50.129.084.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.129.084.000	50.129.084.000
405	Kota Bima	-	-	21.172.210.000	21.172.210.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.172.210.000	21.172.210.000
406	Kab. Sumbawa Barat	49.662.057.000	49.329.862.000	9.646.695.000	9.646.695.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.308.752.000	58.976.557.000
407	Kab. Lombok Utara	63.225.544.000	63.225.544.000	33.459.859.000	33.459.859.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.685.403.000	96.685.403.000
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
409	Kab. Alor	134.401.170.000	134.401.170.000	26.662.525.000	26.662.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.063.695.000	161.063.695.000
410	Kab. Belu	64.370.256.000	64.370.256.000	21.126.761.000	21.126.761.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.497.017.000	85.497.017.000
411	Kab. Ende	213.123.335.000	210.467.635.770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213.123.335.000	210.467.635.770
412	Kab. Flores Timur	180.347.992.000	180.183.689.349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.347.992.000	180.183.689.349
413	Kab. Kupang	153.099.304.000	153.099.304.000	17.501.458.000	17.501.458.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.600.762.000	170.600.762.000
414	Kab. Lembata	124.903.067.000	124.903.067.000	16.834.736.000	16.834.736.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141.737.803.000	141.737.803.000
415	Kab. Manggarai	127.982.480.000	127.982.480.000	5.809.126.000	5.809.126.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.791.606.000	133.791.606.000
416	Kab. Ngada	107.579.648.000	107.579.648.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.579.648.000	107.579.648.000
417	Kab. Sikka	136.087.827.000	136.087.827.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136.087.827.000	136.087.827.000
418	Kab. Sumba Barat	59.750.038.000	59.750.038.000	30.066.851.000	30.066.851.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.816.889.000	89.816.889.000
419	Kab. Sumba Timur	138.950.764.000	138.950.764.000	28.624.228.000	28.624.228.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167.574.992.000	167.574.992.000
420	Kab. Timor Tengah Selatan	250.740.120.000	250.455.378.400	20.126.677.000	20.126.677.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.866.797.000	270.582.055.400
421	Kab. Timor Tengah Utara	147.978.094.000	147.552.503.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147.978.094.000	147.552.503.900
422	Kota Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423	Kab. Rote Ndao	107.810.890.000	107.810.890.000	16.751.396.000	16.751.396.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.562.286.000	124.562.286.000
424	Kab. Manggarai Barat	145.594.391.000	145.594.391.000	5.799.334.000	5.799.334.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151.393.725.000	151.393.725.000
425	Kab. Nagekeo	81.928.920.000	81.928.920.000	5.904.794.000	5.904.794.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.833.714.000	87.833.714.000
426	Kab. Sumba Barat Daya	187.540.421.000	187.540.421.000	19.751.646.000	19.751.646.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207.292.067.000	207.292.067.000
427	Kab. Sumba Tengah	67.042.833.000	66.732.475.800	26.343.370.000	26.343.370.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.386.203.000	93.075.845.800
428	Kab. Manggarai Timur	158.242.951.000	157.447.150.500	27.470.913.000	27.470.913.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.713.864.000	184.918.063.500
429	Kab. Sabu Raijua	62.314.987.000	62.145.670.550	24.713.757.000	24.713.757.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.028.744.000	86.859.427.550
430	Kab. Malaka	115.598.346.000	115.598.346.000	25.219.701.000	25.219.701.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.818.047.000	140.818.047.000
431	Provinsi Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	70.721.433.000	70.721.433.000	13.751.146.000	13.751.146.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.472.579.000	84.472.579.000
433	Kab. Maluku Tengah	175.462.092.000	173.367.490.503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.462.092.000	173.367.490.503
434	Kab. Maluku Tenggara	148.775.421.000	148.569.795.000	6.207.486.000	6.207.486.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.982.907.000	154.777.281.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DID, DANA KEISTIMEWAAN DIY, DAN DANA DESA
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

	Daerah	Dana Desa		Insentif Fiskal		Otonomi Khusus Reguler		Otonomi Khusus Spesifik		tonomi Khusus Tambahan Infrastrukt		Otonomi Khusus Aceh		Otonmi Khusus Yogya		Total Pagu	Total Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
435	Kab. Buru	77.084.636.000	76.916.354.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.084.636.000	76.916.354.400
436	Kota Ambon	31.457.579.000	31.457.579.000	11.840.063.000	11.840.063.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.297.642.000	43.297.642.000
437	Kab. Seram Bagian Barat	92.236.131.000	91.561.512.925	14.084.507.000	14.084.507.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.320.638.000	105.646.019.925
438	Kab. Seram Bagian Timur	160.981.079.000	160.981.079.000	12.792.733.000	12.792.733.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173.773.812.000	173.773.812.000
439	Kab. Kepulauan Aru	103.653.383.000	103.653.383.000	8.500.708.000	4.250.354.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.154.091.000	107.903.737.000
440	Kota Tual	23.459.688.000	23.329.951.286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.459.688.000	23.329.951.286
441	Kab. Maluku Barat Daya	103.734.301.000	103.734.301.000	25.005.351.000	25.005.351.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128.739.652.000	128.739.652.000
442	Kab. Buru Selatan	69.566.238.000	69.566.238.000	11.542.629.000	11.542.629.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.108.867.000	81.108.867.000
443	Provinsi Papua	-	-	-	-	209.261.147.000	209.261.147.000	261.576.434.000	261.576.434.000	580.361.077.000	580.361.077.000	-	-	-	-	1.051.198.658.000	1.051.198.658.000
444	Kab. Biak Numfor	191.607.849.000	191.607.849.000	-	-	63.690.776.000	63.690.776.000	79.613.469.000	79.613.469.000	7.167.356.000	7.167.356.000	-	-	-	-	342.079.450.000	342.079.450.000
445	Kab. Jayapura	120.885.139.000	120.885.139.000	-	-	71.744.448.000	71.744.448.000	89.680.561.000	89.680.561.000	15.677.502.000	15.677.502.000	-	-	-	-	297.987.650.000	297.987.650.000
446	Kab. Jayawijaya	269.928.305.000	269.928.305.000	18.459.872.000	18.459.872.000	79.966.634.000	79.966.634.000	99.958.293.000	99.958.293.000	11.540.980.000	11.540.980.000	-	-	-	-	479.854.084.000	479.854.084.000
447	Kab. Merauke	189.347.876.000	187.527.260.988	-	-	87.311.476.000	87.311.476.000	109.139.346.000	109.139.346.000	19.485.269.000	19.485.269.000	-	-	-	-	405.283.967.000	403.463.351.988
448	Kab. Mimika	130.605.281.000	130.605.281.000	-	-	66.301.268.000	66.301.268.000	82.876.585.000	82.876.585.000	5.179.145.000	5.179.145.000	-	-	-	-	284.962.279.000	284.962.279.000
449	Kab. Nabire	77.226.711.000	77.226.711.000	25.369.083.000	25.369.083.000	59.110.619.000	59.110.619.000	73.888.274.000	73.888.274.000	7.362.235.000	7.362.235.000	-	-	-	-	242.956.922.000	242.956.922.000
450	Kab. Paniai	193.500.413.000	193.500.413.000	19.126.594.000	19.126.594.000	67.072.823.000	67.072.823.000	83.841.029.000	83.841.029.000	17.560.314.000	17.560.314.000	-	-	-	-	381.101.173.000	381.101.173.000
451	Kab. Puncak Jaya	285.584.761.000	285.584.761.000	15.126.261.000	15.126.261.000	88.557.698.000	88.557.698.000	110.697.122.000	110.697.122.000	25.680.281.000	25.680.281.000	-	-	-	-	525.646.123.000	525.646.123.000
452	Kab. Kepulauan Yapen	122.409.975.000	122.409.975.000	-	-	57.063.705.000	57.063.705.000	71.329.632.000	71.329.632.000	13.036.457.000	13.036.457.000	-	-	-	-	263.839.769.000	263.839.769.000
453	Kota Jayapura	11.520.843.000	11.481.961.408	-	-	73.055.096.000	73.055.096.000	91.318.870.000	91.318.870.000	5.009.277.000	5.009.277.000	-	-	-	-	180.904.086.000	180.865.204.408
454	Kab. Sarmi	88.110.756.000	88.110.756.000	-	-	54.732.939.000	54.732.939.000	68.416.173.000	68.416.173.000	9.813.604.000	9.813.604.000	-	-	-	-	221.073.472.000	221.073.472.000
455	Kab. Keerom	80.560.098.000	80.560.098.000	19.126.594.000	19.126.594.000	46.316.765.000	46.316.765.000	57.895.956.000	57.895.956.000	10.589.399.000	10.589.399.000	-	-	-	-	214.488.812.000	214.488.812.000
456	Kab. Yahukimo	440.434.121.000	440.434.121.000	16.709.726.000	16.709.726.000	118.123.430.000	118.123.430.000	147.654.288.000	147.654.288.000	32.151.179.000	32.151.179.000	-	-	-	-	755.072.744.000	755.072.744.000
457	Kab. Pegunungan Bintang	237.837.594.000	237.837.594.000	11.750.979.000	11.750.979.000	71.303.810.000	71.303.810.000	89.129.762.000	89.129.762.000	24.807.286.000	24.807.286.000	-	-	-	-	434.829.431.000	434.829.431.000
458	Kab. Tolikara	423.167.940.000	423.167.940.000	9.834.153.000	9.834.153.000	75.053.010.000	75.053.010.000	93.816.262.000	93.816.262.000	21.927.295.000	21.927.295.000	-	-	-	-	623.798.660.000	623.798.660.000
459	Kab. Boven Digoel	116.409.743.000	116.409.743.000	12.501.042.000	12.501.042.000	56.143.331.000	56.143.331.000	70.179.163.000	70.179.163.000	12.041.840.000	12.041.840.000	-	-	-	-	267.275.119.000	267.275.119.000
460	Kab. Mappi	177.422.554.000	177.422.554.000	12.501.042.000	12.501.042.000	86.864.652.000	86.864.652.000	108.580.815.000	108.580.815.000	43.439.012.000	43.439.012.000	-	-	-	-	428.808.075.000	428.808.075.000
461	Kab. Asmat	232.769.646.000	232.769.646.000	21.126.761.000	21.126.761.000	83.746.796.000	83.746.796.000	104.683.495.000	104.683.495.000	24.264.651.000	24.264.651.000	-	-	-	-	466.591.349.000	466.591.349.000
462	Kab. Waropen	84.938.124.000	84.938.124.000	8.167.347.000	8.167.347.000	43.612.699.000	43.612.699.000	54.515.874.000	54.515.874.000	14.812.557.000	14.812.557.000	-	-	-	-	206.046.601.000	206.046.601.000
463	Kab. Supiori	29.169.529.000	28.108.582.200	21.003.430.000	21.003.430.000	31.324.772.000	31.324.772.000	39.155.965.000	39.155.965.000	8.939.283.000	8.939.283.000	-	-	-	-	129.592.979.000	128.532.032.200
464	Kab. Mamberamo Raya	70.850.665.000	70.850.665.000	10.209.184.000	10.209.184.000	46.734.811.000	46.734.811.000	58.418.514.000	58.418.514.000	69.227.763.000	69.227.763.000	-	-	-	-	255.440.937.000	255.440.937.000
465	Kab. Mamberamo Tengah	49.452.196.000	49.452.196.000	6.750.563.000	6.750.563.000	31.992.697.000	31.992.697.000	39.990.871.000	39.990.871.000	21.614.641.000	21.614.641.000	-	-	-	-	149.800.968.000	149.800.968.000
466	Kab. Yalimo	227.043.943.000	227.043.943.000	14.834.570.000	7.417.285.000	41.378.118.000	41.378.118.000	51.722.647.000	51.722.647.000	15.005.544.000	15.005.544.000	-	-	-	-	349.984.822.000	342.567.537.000
467	Kab. Lanny Jaya	336.190.923.000	336.190.923.000	23.100.489.000	23.100.489.000	82.731.433.000	82.731.433.000	103.414.291.000	103.414.291.000	23.278.315.000	23.278.315.000	-	-	-	-	568.715.451.000	568.715.451.000
468	Kab. Nduga	218.448.361.000	208.348.932.000	10.459.205.000	10.459.205.000	48.885.007.000	48.885.007.000	61.106.259.000	61.106.259.000	23.271.168.000	23.271.168.000	-	-	-	-	362.170.000.000	352.070.571.000
469	Kab. Dogiyai	91.414.451.000	91.414.451.000	10.834.236.000	10.834.236.000	38.042.530.000	38.042.530.000	47.553.162.000	47.553.162.000	20.501.773.000	20.501.773.000	-	-	-	-	208.346.152.000	208.346.152.000
470	Kab. Puncak	195.934.333.000	195.934.333.000	15.501.292.000	15.501.292.000	101.742.310.000	101.742.310.000	127.177.888.000	127.177.888.000	39.500.657.000	39.500.657.000	-	-	-	-	479.856.480.000	479.856.480.000
471	Kab. Intan Jaya	103.322.718.000	103.322.718.000	15.288.205.000	15.288.205.000	42.893.228.000	42.893.228.000	53.616.535.000	53.616.535.000	33.864.707.000	33.864.707.000	-	-	-	-	248.985.393.000	248.985.393.000
472	Kab. Deiyai	65.522.539.000	65.522.539.000	9.834.153.000	9.834.153.000	50.424.913.000	50.424.913.000	63.031.141.000	63.031.141.000	12.797.642.000	12.797.642.000	-	-	-	-	201.610.388.000	201.610.388.000
473	Provinsi Maluku Utara	-	-	15.961.498.000	12.833.375.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.961.498.000	12.833.375.000
474	Kab. Halmahera Tengah	50.695.829.000	50.695.829.000	5.689.821.000	5.689.821.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.385.650.000	56.385.650.000
475	Kota Ternate	-	-	30.386.501.000	30.386.501.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.386.501.000	30.386.501.000
476	Kab. Halmahera Barat	131.996.607.000	131.996.607.000	6.390.338.000	6.390.338.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138.386.945.000	138.386.945.000
477	Kab. Halmahera Timur	91.302.877.000	90.059.876.200	16.253.308.000	16.253.308.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.556.185.000	106.313.184.200
478	Kab. Halmahera Selatan	207.027.278.000	206.565.958.411	25.896.124.000	25.896.124.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232.923.402.000	232.462.082.411
479	Kab. Halmahera Utara	150.623.717.000	150.623.717.000	5.857.009.000	2.928.504.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156.480.726.000	153.552.221.500
480	Kab. Kepulauan Sula	66.432.321.000	66.432.311.992	19.126.594.000	19.126.594.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.558.915.000	85.558.905.992
481	Kota Tidore Kepulauan	39.605.869.000	39.605.868.000	37.471.803.000	37.471.803.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.077.672.000	77.077.671.000
482	Kab. Pulau Morotai	68.544.651.000	68.544.651.000	24.251.281.000	24.251.281.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.795.932.000	92.795.932.000
483	Kab. Pulau Taliabu	58.869.676.000	58.869.676.000	19.788.331.000	19.788.331.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.658.007.000	78.658.007.000
484	Provinsi Banten	-	-	45.278.197.000	45.278.197.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.278.197.000	45.278.197.000
485	Kab. Lebak	354.640.034.000	354.640.034.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354.640.034.000	354.640.034.000
486	Kab. Pandeglang	331.794.102.000	331.794.102.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331.794.102.000	331.794.102.000
487	Kab. Serang	324.409.539.000	324.409.539.000	24.535.866.000	24.535.866.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348.945.405.000	348.945.405.000
488	Kab. Tangerang	336.886.617.000	336.886.617.000	6.477.097.000	6.477.097.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343.363.714.000	343.363.714.000
489	Kota Cilegon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
490	Kota Tangerang	-	-	5.385.758.000	5.385.758.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.385.758.000	5.385.758.000
491	Kota Serang	-	-	26.251.215.000	26.251.215.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.251.215.000	26.251.215.000
492	Kota Tangerang Selatan	-	-	29.005.073.000	29.005.073.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.005.073.000	29.005.073.000
493	Provinsi Bangka Belitung	-	-	33.908.568.000	33.908.568.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.908.568.000	33.908.568.000
494	Kab. Bangka	57.863.983.000	57.863.983.000	18.244.339.000	18.244.339.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.108.322.000	76.108.322.000
495	Kab. Belitung	41.042.594.000	40.466.853.100	41.029.718.000	41.029.718.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.072.312.000	81.496.571.100
496	Kota Pangkal Pinang	-	-	12.106.347.000	12.106.347.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.106.347.000	12.106.347.000
497	Kab. Bangka Selatan	46.472.036.000	46.472.036.000	17.728.623.000	14.779.833.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.200.659.000	61.251.869.000
498	Kab. Bangka Tengah	50.883.326.000	50.883.326.000	37.597.452.000	37.597.452.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.480.778.000	88.480.778.000
499	Kab. Bangka Barat	54.434.722.000	54.434.722.000	26.956.967.000	26.956.967.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.391.689.000	81.391.689.000
500	Kab. Belitung Timur	38.883.640.000	38.883.640.000	26.408.103.000	26.408.103.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.291.743.000	65.291.743.000
501	Provinsi Gorontalo	-	-	30.445.345.000	30.445.345.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.445.345.000	30.445.345.000
502	Kab. Boalemo	72.717.025.000	72.534.933.400	9.867.253.000	9.867.253.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.584.278.000	82.402.186.400
503	Kab. Gorontalo	168.040.351.000	168.040.351.000	5.944.899.000	5.944.899.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173.985.250.000	173.985.250.000
504	Kota Gorontalo	-	-	44.837.310.000	44.837.310.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.837.310.000	44.837.310.000
505	Kab. Pohuwato	86.089.386.000	86.083.963.735	20.240.694.000	20.240.694.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.330.080.000	106.324.657.735
506	Kab. Bone Bolango	122.626.132.000	122.626.132.000	12.267.000.000	12.267.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134.893.132.000	134.893.132.000
507	Kab. Gorontalo Utara	95.434.159.000	95.434.159.000	5.888.177.000	5.888.177.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.322.336.000	101.322.336.000
508	Provinsi Kepulauan Riau	-	-	6.693.745.000	6.693.745.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.693.745.000	6.693.745.000
509	Kab. Natuna	53.850.434.000	53.850.434.000	30.674.314.000	30.674.314.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.524.748.000	84.524.748.000
510	Kab. Kepulauan Anambas	39.126.062.000	39.126.062.000	16.356.155.000	16.356.155.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.482.217.000	55.482.217.000
511	Kab. Karimun	37.646.768.000	37.646.768.000	28.554.463.000	28.554.463.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.201.231.000	66.201.231.000
512	Kota Batam	-	-	18.995.288.000	18.995.288.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.995.288.000	18.995.288.000
513	Kota Tanjung Pinang	-	-	27.666.976.000	27.666.976.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.666.976.000	27.666.976.000
514	Kab. Lingga	63.613.091.000	63.457.450.966	11.963.329.000	11.963.329.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.576.420.000	75.420.779.966
515	Kab. Bintan	31.699.703.000	31.699.703.000	25.865.193.000	25.865.193.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.564.896.000	57.564.896.000
516	Provinsi Papua Barat	-	-	-	-	199.627.880.000	199.627.880.000	249.534.850.000	249.534.850.000	562.779.516.000	562.779.516.000	-	-	-	-	1.011.942.246.000	1.011.942.246.000
517	Kab. Fak Fak	121.319.045.000	121.319.045.000	-	-	59.833.161.000	59.833.161.000	74.791.451.000	74.791.451.000	35.559.339.000	35.559.339.000	-	-	-	-	291.502.996.000	291.502.996.000
518	Kab. Manokwari	130.413.035.000	130.413.035.000	-	-	97.064.310.000	97.064.310.000	121.330.387.000	121.330.387.000	24.599.334.000	24.599.334.000	-	-	-	-	373.407.066.000	373.407.066.000
519	Kab. Sorong	169.829.749.000	169.538.080.200	18.220.852.000	18.220.852.000	46.161.775.000	46.161.775.000	57.702.219.000	57.702.219.000	23.596.107.000	23.596.107.000	-	-	-	-	315.510.702.000	315.219.033.200
520	Kota Sorong	-	-	-	-	88.775.345.000	88.775.345.000	110.969.181.000	110.969.181.000	10.984.816.000	10.984.816.000	-	-	-	-	210.729.342.000	210.729.342.000
521	Kab. Raja Ampat	94.852.583.000	94.852.583.000	-	-	98.205.026.000	98.205.026.000	122.756.283.000	122.756.283.000	64.187.278.000	64.187.278.000	-	-	-	-	380.001.170.000	380.001.170.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DID, DANA KEISTIMEWAAN DIY, DAN DANA DESA
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

	Daerah	Dana Desa		Insentif Fiskal		Otonomi Khusus Reguler		Otonomi Khusus Spesifik		tonomi Khusus Tambahan Infrastrukt		Otonomi Khusus Aceh		Otonmi Khusus Yogya		Total Pagu	Total Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
522	Kab. Sorong Selatan	99.926.470.000	77.367.898.800	30.310.384.000	30.310.384.000	64.824.650.000	64.824.650.000	81.030.813.000	81.030.813.000	36.880.084.000	36.880.084.000	-	-	-	-	312.972.401.000	290.413.829.800
523	Kab. Teluk Bintuni	103.209.977.000	103.209.977.000	16.793.066.000	16.793.066.000	51.657.187.000	51.657.187.000	64.571.484.000	64.571.484.000	33.783.533.000	33.783.533.000	-	-	-	-	270.015.247.000	270.015.247.000
524	Kab. Teluk Wondama	64.590.528.000	64.590.528.000	16.418.035.000	16.418.035.000	60.211.412.000	60.211.412.000	75.264.264.000	75.264.264.000	42.535.274.000	42.535.274.000	-	-	-	-	259.019.513.000	259.019.513.000
525	Kab. Kaimana	84.393.767.000	84.393.767.000	-	-	56.533.562.000	56.533.562.000	70.666.953.000	70.666.953.000	43.783.655.000	43.783.655.000	-	-	-	-	255.377.937.000	255.377.937.000
526	Kab. Maybrat	188.115.468.000	188.115.468.000	17.084.757.000	17.084.757.000	86.696.554.000	86.696.554.000	108.370.692.000	108.370.692.000	43.185.732.000	43.185.732.000	-	-	-	-	443.453.203.000	443.453.203.000
527	Kab. Tambrauw	166.719.639.000	166.719.639.000	17.793.149.000	17.793.149.000	55.616.469.000	55.616.469.000	69.520.586.000	69.520.586.000	49.143.645.000	49.143.645.000	-	-	-	-	358.793.488.000	358.793.488.000
528	Kab. Manokwari Selatan	49.740.256.000	49.740.256.000	13.834.486.000	13.834.486.000	54.150.132.000	54.150.132.000	67.687.666.000	67.687.666.000	17.202.196.000	17.202.196.000	-	-	-	-	202.614.736.000	202.614.736.000
529	Kab. Pegunungan Arfak	128.921.849.000	128.921.849.000	12.542.712.000	12.542.712.000	86.348.624.000	86.348.624.000	107.935.780.000	107.935.780.000	43.727.890.000	43.727.890.000	-	-	-	-	379.476.855.000	379.476.855.000
530	Provinsi Sulawesi Barat	-	-	8.620.508.000	8.620.508.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.620.508.000	8.620.508.000
531	Kab. Majene	55.815.279.000	55.815.279.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.815.279.000	55.815.279.000
532	Kab. Mamuju	85.572.902.000	85.572.902.000	10.176.284.000	10.176.284.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.749.186.000	95.749.186.000
533	Kab. Polewali Mandar	144.190.872.000	144.190.872.000	5.632.014.000	5.632.014.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.822.886.000	149.822.886.000
534	Kab. Mamasa	139.208.794.000	139.208.794.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.208.794.000	139.208.794.000
535	Kab. Pasangkayu	54.173.733.000	53.799.805.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.173.733.000	53.799.805.000
536	Kab. Mamuju Tengah	51.720.040.000	51.720.040.000	6.018.759.000	6.018.759.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.738.799.000	57.738.799.000
537	Provinsi Kalimantan Utara	-	-	24.666.327.000	24.666.327.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.666.327.000	24.666.327.000
538	Provinsi Papua Tengah	-	-	-	-	220.348.024.000	220.348.024.000	275.435.030.000	275.435.030.000	611.109.219.000	611.109.219.000	-	-	-	-	1.106.892.273.000	1.106.892.273.000
539	Provinsi Papua Selatan	-	-	-	-	134.599.823.000	134.599.823.000	168.249.779.000	168.249.779.000	373.296.713.000	373.296.713.000	-	-	-	-	676.146.315.000	676.146.315.000
540	Provinsi Papua Pegunungan	-	-	-	-	235.471.774.000	235.471.774.000	294.339.717.000	294.339.717.000	653.053.153.000	653.053.153.000	-	-	-	-	1.182.864.644.000	1.182.864.644.000
541	Provinsi Papua Barat Daya	-	-	-	-	188.691.351.000	188.691.351.000	235.864.189.000	235.864.189.000	531.947.877.000	531.947.877.000	-	-	-	-	956.503.417.000	956.503.417.000
542	Kab. Bulungan	74.255.212.000	74.255.212.000	26.675.829.000	26.675.829.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.931.041.000	100.931.041.000
543	Kab. Malinau	117.636.673.000	117.636.673.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.636.673.000	117.636.673.000
544	Kab. Nunukan	185.407.131.000	179.186.422.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.407.131.000	179.186.422.500
545	Kota Tarakan	-	-	23.343.638.000	23.343.638.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.343.638.000	23.343.638.000
546	Kab. Tana Tidung	29.655.371.000	29.655.371.000	5.806.329.000	5.806.329.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.461.700.000	35.461.700.000
	Jumlah	70.000.000.000.000	69.856.768.617.317	8.000.000.000.000	7.906.031.813.500	3.960.000.000.000	3.960.000.000.000	4.950.000.000.000	4.950.000.000.000	4.371.263.570.000	4.371.263.570.000	3.960.000.000.000	3.960.000.000.000	1.420.000.000.000	1.372.725.809.224	96.661.263.570.000	96.376.789.810.041

LAPORAN REALISASI ANGGARAN HIBAH KEPADA DAERAH
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Hibah Jalan/Sanitasi Air Limbah		IPDMIP-IFAD		READSI		National Urban Water Supply Project		UPLAND IsDB		UPLAND IFAD		UPLAND		PCSP		Bio CF ISFL		MRT		Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah		Total Pagu Hibah	Total Realisasi Hibah
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)			(27)	(28)
1	Provinsi Aceh	-	-	1.591.354.000	1.214.048.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1.591.354.000	1.214.048.550
2	Kab. Aceh Barat	900.000.000	887.507.653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	900.000.000	887.507.653
3	Kab. Aceh Besar	-	-	2.197.944.000	230.836.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	2.197.944.000	230.836.300
4	Kab. Aceh Selatan	1.174.000.000	916.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1.174.000.000	916.000.000
5	Kab. Aceh Singkil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
6	Kab. Aceh Tengah	576.000.000	570.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	576.000.000	570.000.000
7	Kab. Aceh Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
8	Kab. Aceh Timur	2.282.000.000	2.246.000.000	145.274.000	61.947.608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	2.427.274.000	2.307.947.608
9	Kab. Aceh Utara	-	-	37.513.000	17.134.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	37.513.000	17.134.280
10	Kab. Bireuen	-	-	314.642.000	224.163.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	314.642.000	224.163.000
11	Kab. Pidie	300.000.000	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	300.000.000	300.000.000
12	Kab. Simeulue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
13	Kota Banda Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
14	Kota Sabang	300.000.000	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	300.000.000	300.000.000
15	Kota Langsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
16	Kota Lhokseumawe	540.000.000	222.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	540.000.000	222.000.000
17	Kab. Gayo Lues	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
18	Kab. Aceh Barat Daya	500.000.000	484.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	500.000.000	484.500.000
19	Kab. Aceh Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
20	Kab. Nagan Raya	1.750.000.000	963.978.880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1.750.000.000	963.978.880
21	Kab. Aceh Tamiang	6.300.000.000	6.300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	6.300.000.000	6.300.000.000
22	Kab. Bener Meriah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
23	Kab. Pidie Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
24	Kota Subulussalam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
25	Provinsi Sumatera Utara	72.627.938.000	65.877.043.833	36.473.000	36.172.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	72.664.411.000	65.913.215.833
26	Kab. Asahan	-	-	42.723.000	4.404.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	42.723.000	4.404.000
27	Kab. Dairi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
28	Kab. Deli Serdang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
29	Kab. Karo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
30	Kab. Labuhanbatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
31	Kab. Langkat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
32	Kab. Mandailing Natal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
33	Kab. Nias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
34	Kab. Simalungun	18.771.657.000	18.043.266.262	896.395.000	624.763.286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	19.668.052.000	18.668.029.548
35	Kab. Tapanuli Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
36	Kab. Tapanuli Tengah	-	-	270.279.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	270.279.000	-
37	Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
38	Kab. Toba Samosir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
39	Kota Binjai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
40	Kota Medan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
41	Kota Pematang Siantar	1.500.000.000	894.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1.500.000.000	894.000.000
42	Kota Sibolga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
43	Kota Tanjung Balai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
44	Kota Tebing Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
45	Kota Padang Sidempuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
46	Kab. Pakpak Bharat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
47	Kab. Nias Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
48	Kab. Humbang Hasundutan	22.620.655.000	22.342.974.255	313.204.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	22.933.859.000	22.342.974.255
49	Kab. Serdang Bedagai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
50	Kab. Samosir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
51	Kab. Batu Bara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
52	Kab. Padang Lawas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
53	Kab. Padang Lawas Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
55	Kab. Labuhanbatu Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
56	Kab. Nias Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
57	Kab. Nias Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
58	Kota Gunungsitoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
59	Provinsi Sumatera Barat	-	-	454.460.000	99.091.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	454.460.000	99.091.500
60	Kab. Lima Puluh Kota	3.598.000.000	3.011.410.000	303.187.000	68.689.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	3.901.187.000	3.080.099.400
61	Kab. Agam	4.500.000.000	3.654.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	4.500.000.000	3.654.000.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
63	Kab. Padang Pariaman	500.000.000	445.291.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	500.000.000	445.291.000
64	Kab. Pasaman	5.000.000.000	3.544.000.000	1.400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	6.400.000.000	3.544.000.000
65	Kab. Pesisir Selatan	7.734.000.000	6.017.000.000	709.404.000	588.013.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1.445.036.000	1.058.505.000	9.888.440.000	7.663.518.580
66	Kab. Sijunjung	1.533.000.000	1.533.000.000	485.091.000	150.119.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	2.018.091.000	1.683.119.000
67	Kab. Solok	4.628.000.000	1.184.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	4.628.000.000	1.184.000.000
68	Kab. Tanah Datar	3.320.000.000	3.157.882.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	3.320.000.000	3.157.882.000
69	Kota Bukit Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
70	Kota Padang Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
71	Kota Padang	3.528.000.000	2.403.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	3.528.000.000	2.403.000.000
72	Kota Payakumbuh	1.800.000.000	1.800.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1.800.000.000	1.800.000.000
73	Kota Sawahlunto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
74	Kota Solok	1.164.000.000	918.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1.164.000.000	918.000.000
75	Kota Pariaman	6.000.000.000	1.272.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	6.000.000.000	1.272.000.000
76	Kab. Pasaman Barat	1.500.000.000	1.443.000.000	156.816.000	106.569.363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1.656.816.000	1.549.569.363
77	Kab. Dharmasraya	3.100.000.000	1.924.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	3.100.000.000	1.924.000.000
78	Kab. Solok Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
79	Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
80	Kab. Bengkalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
81	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
82	Kab. Indragiri Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
83	Kab. Kampar	2.100.000.000	2.100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	2.100.000.000	2.100.000.000
84	Kab. Kuantan Singingi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
85	Kab. Pelalawan	500.000.000	238.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	500.000.000	238.000.000
86	Kab. Rokan Hilir	600.000.000	312.973.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	600.000.000	312.973.395
87	Kab. Rokan Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
88	Kab. Siak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
89	Kota Dumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
90	Kota Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
91	Kab. Kepulauan Meranti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
92	Provinsi Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.802.922.000	##########			-	-	31.802.922.000	27.815.501.472
93	Kab. Batanghari	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	3.000.000.000	3.000.000.000
94	Kab. Bungo	9.330.000.000	8.184.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	9.330.000.000	8.184.000.000
95	Kab. Kerinci	3.000.000.000	1.587.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	3.000.000.000	1.587.000.000
96	Kab. Merangin	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	3.000.000.000	3.000.000.000
97	Kab. Muaro Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
98	Kab. Sarolangun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
101	Kab. Tebo	16.494.000.000	13.722.176.810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	16.494.000.000	13.722.176.810
102	Kota Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
103	Kota Sungai Penuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
104	Provinsi Sumatera Selatan	-	-	305.795.000	139.433.676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	305.795.000	139.433.676
105	Kab. Lahat	-	-	654.667.000	68.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	654.667.000	68.300.000
106	Kab. Musi Banyuasin	1.800.000.000	1.800.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1.800.000.000	1.800.000.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN HIBAH KEPADA DAERAH
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Hibah Jalan/Sanitasi Air Limbah		IPDMIP-IFAD		READSI		National Urban Water Supply Project		UPLAND IsDB		UPLAND IFAD		UPLAND		PCSP		Bio CF ISFL		MRT		Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah		Total Pagu Hibah	Total Realisasi Hibah
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)			(27)	(28)
107	Kab. Musi Rawas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
108	Kab. Muara Enim	3.150.000.000	2.190.000.000	247.136.000	213.998.090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	3.397.136.000	2.403.998.090
109	Kab. Ogan Komering Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
110	Kab. Ogan Komering Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
111	Kota Palembang	9.744.000.000	534.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.906.813.000	89.906.811.006	-	-			-	-	99.650.813.000	90.440.811.006
112	Kota Prabumulih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
113	Kota Pagar Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
114	Kota Lubuk Linggau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
115	Kab. Banyuasin	2.800.000.000	2.798.000.000	272.949.000	243.177.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	3.072.949.000	3.041.177.000
116	Kab. Ogan Ilir	900.000.000	900.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	900.000.000	900.000.000
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	4.844.000.000	3.108.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	4.844.000.000	3.108.000.000
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	4.500.000.000	4.280.000.000	2.440.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	4.502.440.000	4.280.000.000
119	Kab. Empat Lawang	4.100.000.000	1.586.000.000	68.375.000	68.375.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	4.168.375.000	1.654.375.000
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
121	Kab. Musi Rawas Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
122	Provinsi Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
123	Kab. Bengkulu Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
124	Kab. Bengkulu Utara	2.220.000.000	2.220.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	2.220.000.000	2.220.000.000
125	Kab. Rejang Lebong	3.200.000.000	2.874.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	3.200.000.000	2.874.000.000
126	Kota Bengkulu	1.800.000.000	1.749.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1.800.000.000	1.749.000.000
127	Kab. Kaur	900.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	900.000.000	-
128	Kab. Seluma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
129	Kab. Mukomuko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
130	Kab. Lebong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
131	Kab. Kepahiang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
132	Kab. Bengkulu Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
133	Provinsi Lampung	-	-	815.442.000	285.632.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	815.442.000	285.632.000
134	Kab. Lampung Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
135	Kab. Lampung Selatan	960.000.000	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	960.000.000	300.000.000
136	Kab. Lampung Tengah	3.000.000.000	2.586.000.000	456.647.000	361.275.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	3.456.647.000	2.947.275.000
137	Kab. Lampung Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
138	Kab. Lampung Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
139	Kab. Tanggamus	-	-	1.250.000.000	105.625.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1.250.000.000	105.625.000
140	Kab. Tulang Bawang	-	-	939.984.000	20.478.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	939.984.000	20.478.000
141	Kab. Way Kanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
142	Kota Bandar Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
143	Kota Metro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
144	Kab. Pesawaran	-	-	967.670.000	130.559.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	967.670.000	130.559.000
145	Kab. Pringsewu	1.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1.500.000.000	-
146	Kab. Mesuji	-	-	101.744.000	12.015.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	101.744.000	12.015.000
147	Kab. Tulang Bawang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
148	Kab. Pesisir Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
149	Provinsi DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.984.457.561.000	1.735.248.701.390	-	-	1.984.457.561.000	1.735.248.701.390
150	Provinsi Jawa Barat	-	-	7.752.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	7.752.000	-
151	Kab. Bandung	954.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5.115.000.000	1.721.792.636	6.069.000.000	1.721.792.636
152	Kab. Bekasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
153	Kab. Bogor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
154	Kab. Ciamis	4.000.000.000	3.515.000.000	935.558.000	408.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	4.935.558.000	3.923.520.000
155	Kab. Cianjur	4.800.000.000	4.800.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	4.800.000.000	4.800.000.000
156	Kab. Cirebon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
157	Kab. Garut	3.498.000.000	-	406.940.000	69.709.900	-	-	-	-	10.957.950.000	6.048.213.000	4.520.000.000	4.389.926.600	1.175.000.000	-	-	-	-	-			-	-	20.557.890.000	10.507.849.500
158	Kab. Indramayu	30.000.000.000	30.000.000.000	271.020.000	269.653.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	30.271.020.000	30.269.653.900
159	Kab. Karawang	9.530.000.000	8.256.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	9.530.000.000	8.256.000.000
160	Kab. Kuningan	6.000.000.000	5.287.120.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	6.000.000.000	5.287.120.850
161	Kab. Majalengka	-	-	600.191.000	156.125.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	600.191.000	156.125.500
162	Kab. Purwakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
163	Kab. Subang	6.000.000.000	6.000.000.000	-	-	-	-	-	-	12.405.800.000	7.619.910.000	4.225.000.000	1.984.250.000	1.972.500.000	-	-	-	-	-			-	-	24.603.300.000	15.604.160.000
164	Kab. Sukabumi	13.300.000.000	10.343.000.000	284.453.000	47.996.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	13.584.453.000	10.390.996.000
165	Kab. Sumedang	-	-	102.982.000	102.580.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3.484.169.000	434.553.033	3.587.151.000	537.133.033
166	Kab. Tasikmalaya	4.500.000.000	4.500.000.000	-	-	-	-	-	-	3.493.195.000	3.455.920.350	2.173.805.000	1.108.100.000	1.175.000.000	-	-	-	-	-			-	-	11.342.000.000	9.064.020.350
167	Kota Bandung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
168	Kota Bekasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
169	Kota Bogor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
170	Kota Cirebon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2.240.946.000	2.130.000.000	2.240.946.000	2.130.000.000
171	Kota Depok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
172	Kota Sukabumi	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1.500.000.000	1.500.000.000
173	Kota Tasikmalaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
174	Kota Cimahi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
175	Kota Banjar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
176	Kab. Bandung Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
177	Kab. Pangandaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
178	Provinsi Jawa Tengah	56.556.782.000	54.495.623.308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	56.556.782.000	54.495.623.308
179	Kab. Banjarnegara	2.000.000.000	2.000.000.000	451.230.000	250.937.269	-	-	-	-	11.541.434.000	9.821.239.300	7.278.149.000	7.274.059.967	750.000.000	-	-	-	-	-			-	-	22.020.813.000	19.346.236.536
180	Kab. Banyumas	9.930.000.000	9.930.000.000	225.852.000	42.712.026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2.209.242.000	1.024.300.942	12.365.094.000	10.997.012.968
181	Kab. Batang	500.000.000	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	500.000.000	500.000.000
182	Kab. Blora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
183	Kab. Boyolali	5.240.000.000	5.224.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	5.240.000.000	5.224.000.000
184	Kab. Brebes	13.500.000.000	13.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2.455.581.000	1.053.262.500	15.955.581.000	14.553.262.500
185	Kab. Cilacap	22.764.000.000	22.698.000.000	861.631.000	611.328.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	23.625.631.000	23.309.328.200
186	Kab. Demak	13.480.000.000	10.410.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	13.480.000.000	10.410.000.000
187	Kab. Grobogan	7.234.000.000	5.950.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	7.234.000.000	5.950.000.000
188	Kab. Jepara	4.700.000.000	4.694.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	4.700.000.000	4.694.000.000
189	Kab. Karanganyar	7.210.000.000	6.650.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	7.210.000.000	6.650.000.000
190	Kab. Kebumen	1.490.000.000	1.188.000.000	137.583.000	123.797.062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			284.500.000	208.312.500	1.912.083.000	1.520.109.562
191	Kab. Kendal	8.000.000.000	8.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	8.000.000.000	8.000.000.000
192	Kab. Klaten	1.200.000.000	1.200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1.200.000.000	1.200.000.000
193	Kab. Kudus	2.700.000.000	1.236.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	2.700.000.000	1.236.000.000
194	Kab. Magelang	3.000.000.000	2.781.000.000	-	-	-	-	-	-	10.152.000.000	10.146.156.093	5.670.000.000	5.527.479.205	2.675.000.000	-	-	-	-	-			-	-	21.497.000.000	18.454.635.298
195	Kab. Pati	860.000.000	842.000.000	647.167.000	645.221.845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1.507.167.000	1.487.221.845
196	Kab. Pekalongan	7.520.000.000	7.100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	7.520.000.000	7.100.000.000
197	Kab. Pemalang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
198	Kab. Purbalingga	4.556.000.000	4.534.000.000	-	-	-	-	-	-	5.198.000.000	4.538.709.944	1.056.000.000	1.050.954.240	-	-	-	-	-	-			-	-	10.810.000.000	10.123.664.184
199	Kab. Purworejo	1.000.000.000	988.000.000	831.497.000	657.020.161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3.000.000	-	1.834.497.000	1.645.020.161
200	Kab. Rembang	2.000.000.000	1.994.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	2.000.000.000	1.994.000.000
201	Kab. Semarang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
202	Kab. Sragen	4.930.000.000	4.238.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	4.930.000.000	4.238.000.000
203	Kab. Sukoharjo	3.000.000.000	1.416.000.000	-	-	-	-	239.395.000	239.395.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	3.239.395.000	1.655.395.000
204	Kab. Tegal	4.500.000.000	4.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5.069.181.000	4.957.995.000	9.569.181.000	9.457.995.000
205	Kab. Temanggung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
206	Kab. Wonogiri	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1.500.000.000	1.500.000.000
207	Kab. Wonosobo	47.012.112.000	46.600.444.930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4.980.000.000	2.070.912.000	51.992.112.000	48.671.356.930
208	Kota Magelang	-	-	-	-	-	-	1.992.203.000	1.992.203.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1.992.203.000	1.992.203.000
209	Kota Pekalongan	2.250.000.000	1.788.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	2.250.000.000	1.788.000.000
210	Kota Salatiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
211	Kota Semarang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
212	Kota Surakarta	900.000.000	900.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	900.000.000	900.000.000
213	Kota Tegal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
214	Provinsi DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN HIBAH KEPADA DAERAH
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Hibah Jalan/Sanitasi Air Limbah		IPDMIP-IFAD		READSI		National Urban Water Supply Project		UPLAND IsDB		UPLAND IFAD		UPLAND		PCSP		Bio CF ISFL		MRT		Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah		Total Pagu Hibah	Total Realisasi Hibah
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)			(27)	(28)
215	Kab. Bantul	7.080.000.000	7.080.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	7.080.000.000	7.080.000.000
216	Kab. Gunung Kidul	5.980.000.000	5.974.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	5.980.000.000	5.974.000.000
217	Kab. Kulon Progo	8.000.000.000	8.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	8.000.000.000	8.000.000.000
218	Kab. Sleman	7.828.000.000	6.719.323.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4.328.418.000	2.805.326.805	12.156.418.000	9.524.649.805
219	Kota Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
220	Provinsi Jawa Timur	-	-	32.415.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	32.415.000	-
221	Kab. Bangkalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
222	Kab. Banyuwangi	6.000.000.000	6.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2.405.000.000	1.822.476.000	8.405.000.000	7.822.476.000
223	Kab. Blitar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
224	Kab. Bojonegoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
225	Kab. Bondowoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
226	Kab. Gresik	7.800.000.000	3.890.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	7.800.000.000	3.890.000.000
227	Kab. Jember	500.000.000	500.000.000	592.303.000	436.104.334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1.092.303.000	936.104.334
228	Kab. Jombang	-	-	542.658.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	542.658.000	-
229	Kab. Kediri	-	-	3.156.381.000	721.452.668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	3.156.381.000	721.452.668
230	Kab. Lamongan	2.000.000.000	1.298.000.000	1.799.228.000	112.368.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	3.799.228.000	1.410.368.400
231	Kab. Lumajang	3.000.000.000	2.982.000.000	790.793.000	121.656.870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	3.790.793.000	3.103.656.870
232	Kab. Madiun	6.000.000.000	6.000.000.000	82.807.000	26.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	6.082.807.000	6.026.250.000
233	Kab. Magetan	8.000.000.000	7.968.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1.725.000.000	1.708.513.092	9.725.000.000	9.676.513.092
234	Kab. Malang	10.500.000.000	9.948.000.000	-	-	-	-	-	-	5.561.500.000	5.547.258.600	6.397.000.000	6.228.240.900	250.000.000	-	-	-	-	-			-	-	22.708.500.000	21.723.499.500
235	Kab. Mojokerto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
236	Kab. Nganjuk	6.000.000.000	3.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	6.000.000.000	3.000.000.000
237	Kab. Ngawi	11.000.000.000	10.800.000.000	28.203.000	26.125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	11.028.203.000	10.826.125.000
238	Kab. Pacitan	1.800.000.000	1.582.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1.800.000.000	1.582.000.000
239	Kab. Pamekasan	2.000.000.000	732.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	2.000.000.000	732.000.000
240	Kab. Pasuruan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
241	Kab. Ponorogo	3.000.000.000	2.904.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	3.000.000.000	2.904.000.000
242	Kab. Probolinggo	1.742.000.000	1.460.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1.742.000.000	1.460.000.000
243	Kab. Sampang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
244	Kab. Sidoarjo	4.300.000.000	2.727.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	4.300.000.000	2.727.000.000
245	Kab. Situbondo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
246	Kab. Sumenep	4.194.000.000	3.163.000.000	-	-	-	-	-	-	1.769.306.000	1.642.268.425	10.444.529.000	9.260.465.674	1.000.000.000	-	-	-	-	-			-	-	17.407.835.000	14.065.734.099
247	Kab. Trenggalek	4.860.000.000	4.797.280.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	4.860.000.000	4.797.280.395
248	Kab. Tuban	-	-	777.032.000	158.662.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	777.032.000	158.662.500
249	Kab. Tulungagung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
250	Kota Blitar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
251	Kota Kediri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
252	Kota Madiun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
253	Kota Malang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
254	Kota Mojokerto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
255	Kota Pasuruan	3.000.000.000	222.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	3.000.000.000	222.000.000
256	Kota Probolinggo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
257	Kota Surabaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
258	Kota Batu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
259	Provinsi Kalimantan Barat	58.148.175.000	57.883.865.264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	58.148.175.000	57.883.865.264
260	Kab. Bengkayang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
261	Kab. Landak	600.000.000	540.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	600.000.000	540.000.000
262	Kab. Kapuas Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
263	Kab. Ketapang	3.600.000.000	1.320.000.000	520.000	520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	3.600.520.000	1.320.520.000
264	Kab. Mempawah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
265	Kab. Sambas	36.072.681.000	26.764.879.384	119.875.000	119.111.000	3.239.920.000	3.189.919.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	39.432.476.000	30.073.909.804
266	Kab. Sanggau	1.170.000.000	1.112.000.000	-	-	93.379.000	19.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1.263.379.000	1.131.850.000
267	Kab. Sintang	4.500.000.000	4.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	4.500.000.000	4.500.000.000
268	Kota Pontianak	7.500.000.000	7.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	7.500.000.000	7.500.000.000
269	Kota Singkawang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
270	Kab. Sekadau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
271	Kab. Melawi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
272	Kab. Kayong Utara	-	-	581.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	581.000	-
273	Kab. Kubu Raya	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	2.000.000.000	2.000.000.000
274	Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
275	Kab. Barito Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
276	Kab. Barito Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
277	Kab. Kapuas	492.000.000	492.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	492.000.000	492.000.000
278	Kab. Kotawaringin Barat	656.000.000	648.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	656.000.000	648.000.000
279	Kab. Kotawaringin Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
280	Kota Palangkaraya	540.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3.146.000.000	1.752.906.664	3.686.000.000	1.752.906.664
281	Kab. Katingan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
282	Kab. Seruyan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
283	Kab. Sukamara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
284	Kab. Lamandau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
285	Kab. Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
286	Kab. Pulang Pisau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
287	Kab. Murung Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
288	Kab. Barito Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
289	Provinsi Kalimantan Selatan	-	-	1.455.049.000	70.346.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1.455.049.000	70.346.700
290	Kab. Banjar	3.036.000.000	2.444.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	3.036.000.000	2.444.000.000
291	Kab. Barito Kuala	-	-	295.785.000	59.635.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	295.785.000	59.635.000
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	108.000.000	108.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	108.000.000	108.000.000
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	-	847.816.000	491.901.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	847.816.000	491.901.200
294	Kab. Hulu Sungai Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
295	Kab. Kotabaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
296	Kab. Tabalong	8.000.000.000	3.962.209.421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	8.000.000.000	3.962.209.421
297	Kab. Tanah Laut	1.156.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1.156.000.000	-
298	Kab. Tapin	-	-	38.222.000	34.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	38.222.000	34.400.000
299	Kota Banjarbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
300	Kota Banjarmasin	2.628.000.000	1.488.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	2.628.000.000	1.488.000.000
301	Kab. Balangan	900.000.000	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	900.000.000	600.000.000
302	Kab. Tanah Bumbu	900.000.000	342.000.000	167.491.000	77.319.072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1.067.491.000	419.319.072
303	Provinsi Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
304	Kab. Berau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
305	Kab. Kutai Kartanegara	5.874.000.000	3.567.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	5.874.000.000	3.567.000.000
306	Kab. Kutai Barat	540.000.000	522.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	540.000.000	522.000.000
307	Kab. Kutai Timur	4.500.000.000	4.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	4.500.000.000	4.500.000.000
308	Kab. Paser	3.999.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	3.999.000.000	-
309	Kota Balikpapan	2.040.000.000	951.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	2.040.000.000	951.000.000
310	Kota Bontang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
311	Kota Samarinda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
312	Kab. Penajam Paser Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1.251.288.000	1.117.682.811	1.251.288.000	1.117.682.811
313	Kab. Mahakam Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
314	Provinsi Sulawesi Utara	-	-	1.381.954.000	118.634.302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1.381.954.000	118.634.302
315	Kab. Bolaang Mongondow	-	-	495.580.000	342.325.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	495.580.000	342.325.200
316	Kab. Minahasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
317	Kab. Sangihe	500.000.000	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	500.000.000	500.000.000
318	Kota Bitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
319	Kota Manado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
320	Kab. Kepulauan Talaud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
321	Kab. Minahasa Selatan	-	-	62.462.000	62.462.000	-	-	-	-	7.444.676.000	7.431.783.072	11.040.000.000	11.023.194.000	2.312.500.000	-	-	-	-	-			-	-	20.859.638.000	18.517.439.072
322	Kota Tomohon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN HIBAH KEPADA DAERAH
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Hibah Jalan/Sanitasi Air Limbah		IPDMIP-IFAD		READSI		National Urban Water Supply Project		UPLAND IsDB		UPLAND IFAD		UPLAND		PCSP		Bio CF ISFL		MRT		Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah		Total Pagu Hibah	Total Realisasi Hibah
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)			(27)	(28)
323	Kab. Minahasa Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	2.000.000.000	-
325	Kota Kotamobagu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
327	Kab. Minahasa Tenggara	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	600.000.000	-
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
330	Provinsi Sulawesi Tengah	-	-	1.000	-	3.925.955.000	3.775.515.621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	3.925.956.000	3.775.515.621
331	Kab. Banggai	-	-	2.803.608.000	311.274.834	5.941.426.000	5.329.971.669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	8.745.034.000	5.641.246.503
332	Kab. Banggai Kepulauan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
333	Kab. Buol	-	-	-	-	3.716.184.000	3.715.438.034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	3.716.184.000	3.715.438.034
334	Kab. Tolitoli	1.258.000.000	322.000.000	764.460.000	120.620.400	2.475.399.000	2.387.534.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	4.497.859.000	2.830.154.400
335	Kab. Donggala	3.000.000.000	750.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	3.000.000.000	750.000.000
336	Kab. Morowali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
337	Kab. Poso	4.800.000.000	4.568.000.000	520.000.000	9.000.000	3.355.115.000	3.345.611.981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	8.675.115.000	7.922.611.981
338	Kota Palu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
339	Kab. Parigi Moutong	-	-	-	-	3.683.314.000	2.756.127.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	3.683.314.000	2.756.127.007
340	Kab. Tojo Una Una	2.720.000.000	2.693.331.842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	2.720.000.000	2.693.331.842
341	Kab. Sigi	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	1.000.000.000	-
342	Kab. Banggai Laut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
343	Kab. Morowali Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
344	Provinsi Sulawesi Selatan	-	-	1.171.670.000	925.454.579	3.064.776.000	3.064.759.619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	4.236.446.000	3.990.214.198
345	Kab. Bantaeng	5.306.000.000	5.284.256.539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	5.306.000.000	5.284.256.539
346	Kab. Barru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
347	Kab. Bone	-	-	912.298.000	388.085.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	912.298.000	388.085.000
348	Kab. Bulukumba	600.000.000	462.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	600.000.000	462.000.000
349	Kab. Enrekang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
350	Kab. Gowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
351	Kab. Jeneponto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
352	Kab. Luwu	1.200.000.000	836.620.000	-	-	2.009.197.000	1.901.081.426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	3.209.197.000	2.737.701.426
353	Kab. Luwu Utara	4.374.000.000	1.362.000.000	-	-	2.442.076.000	2.442.076.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	6.816.076.000	3.804.076.000
354	Kab. Maros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	2.000.000.000	2.000.000.000
356	Kota Palopo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
357	Kab. Luwu Timur	5.526.000.000	2.644.359.498	-	-	6.022.286.000	4.870.550.676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	11.548.286.000	7.514.910.174
358	Kab. Pinrang	-	-	176.660.000	57.109.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	176.660.000	57.109.900
359	Kab. Sinjai	2.700.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	2.700.000.000	-
360	Kab. Kepulauan Selayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
361	Kab. Sidenreng Rappang	2.382.000.000	1.794.000.000	233.440.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	2.615.440.000	1.794.000.000
362	Kab. Soppeng	-	-	124.434.000	109.496.570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	124.434.000	109.496.570
363	Kab. Takalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
364	Kab. Tana Toraja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
365	Kab. Wajo	2.500.000.000	790.000.000	351.577.000	351.524.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	2.851.577.000	1.141.524.160
366	Kota Parepare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
367	Kota Makassar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
368	Kab. Toraja Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	2.416.860.000	2.043.022.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	2.416.860.000	2.043.022.600
370	Kab. Buton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
371	Kab. Konawe	-	-	-	-	2.173.339.000	2.173.338.172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	2.173.339.000	2.173.338.172
372	Kab. Kolaka	-	-	-	-	4.613.033.000	4.613.024.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	4.613.033.000	4.613.024.050
373	Kab. Muna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
374	Kota Kendari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
375	Kota Bau-bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
376	Kab. Konawe Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
377	Kab. Bombana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
378	Kab. Wakatobi	5.400.000.000	3.198.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	5.400.000.000	3.198.000.000
379	Kab. Kolaka Utara	-	-	-	-	4.203.143.000	4.125.468.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	4.203.143.000	4.125.468.450
380	Kab. Konawe Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
381	Kab. Buton Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
382	Kab. Konawe Kepulauan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
383	Kab. Kolaka Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
384	Kab. Muna Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
385	Kab. Buton Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
386	Kab. Buton Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
387	Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
388	Kab. Badung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
389	Kab. Bangli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
390	Kab. Buleleng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
391	Kab. Gianyar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.156.000.000	848.900.704	1.156.000.000	848.900.704
392	Kab. Jembrana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
393	Kab. Karangasem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
394	Kab. Klungkung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
395	Kab. Tabanan	1.000.000.000	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	1.000.000.000	24.000.000
396	Kota Denpasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	-	892.411.000	10.233.268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	892.411.000	10.233.268
398	Kab. Bima	3.000.000.000	2.508.000.000	838.992.000	767.652.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	3.838.992.000	3.275.652.125
399	Kab. Dompu	4.474.000.000	626.000.000	410.906.000	138.996.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	4.884.906.000	764.996.000
400	Kab. Lombok Barat	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	3.000.000.000	3.000.000.000
401	Kab. Lombok Tengah	-	-	113.724.000	53.025.943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	113.724.000	53.025.943
402	Kab. Lombok Timur	1.500.000.000	-	153.442.000	-	-	-	-	-	4.737.300.000	4.730.825.000	15.750.000.000	10.002.854.000	587.500.000	-	-	-	-	-	-		-	-	22.728.242.000	14.733.679.000
403	Kab. Sumbawa	10.200.000.000	10.197.097.242	-	-	-	-	-	-	14.721.000.000	8.090.453.806	10.459.100.000	10.366.747.050	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-		-	-	36.380.100.000	28.654.298.098
404	Kota Mataram	3.750.000.000	3.750.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	3.750.000.000	3.750.000.000
405	Kota Bima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
406	Kab. Sumbawa Barat	1.472.000.000	1.472.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	1.472.000.000	1.472.000.000
407	Kab. Lombok Utara	3.853.000.000	2.840.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	3.853.000.000	2.840.000.000
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	-	528.691.000	160.135.687	1.133.353.000	933.866.962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	1.662.044.000	1.094.002.649
409	Kab. Alor	2.500.000.000	1.870.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	2.500.000.000	1.870.000.000
410	Kab. Belu	1.200.000.000	-	-	-	4.050.297.000	2.977.700.415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	5.250.297.000	2.977.700.415
411	Kab. Ende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
412	Kab. Flores Timur	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	600.000.000	-
413	Kab. Kupang	-	-	-	-	5.900.779.000	4.065.975.781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	5.900.779.000	4.065.975.781
414	Kab. Lembata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
415	Kab. Manggarai	3.900.000.000	3.825.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	3.900.000.000	3.825.000.000
416	Kab. Ngada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
417	Kab. Sikka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
418	Kab. Sumba Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
419	Kab. Sumba Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
420	Kab. Timor Tengah Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
421	Kab. Timor Tengah Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
422	Kota Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
423	Kab. Rote Ndao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
424	Kab. Manggarai Barat	750.000.000	738.000.000	310.269.000	101.276.502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	1.060.269.000	839.276.502
425	Kab. Nagekeo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
426	Kab. Sumba Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
427	Kab. Sumba Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
428	Kab. Manggarai Timur	-	-	2.932.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	2.932.000	-
429	Kab. Sabu Raijua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
430	Kab. Malaka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN HIBAH KEPADA DAERAH
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Hibah Jalan/Sanitasi Air Limbah		IPDMIP-IFAD		READSI		National Urban Water Supply Project		UPLAND IsDB		UPLAND IFAD		UPLAND		PCSP		Bio CF ISFL		MRT		Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah		Total Pagu Hibah	Total Realisasi Hibah
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)			(27)	(28)
431	Provinsi Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
433	Kab. Maluku Tengah	6.210.000.000	2.078.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	6.210.000.000	2.078.000.000
434	Kab. Maluku Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
435	Kab. Buru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
436	Kota Ambon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
437	Kab. Seram Bagian Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
438	Kab. Seram Bagian Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
439	Kab. Kepulauan Aru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
440	Kota Tual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
441	Kab. Maluku Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
442	Kab. Buru Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
443	Provinsi Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
444	Kab. Biak Numfor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
445	Kab. Jayapura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
446	Kab. Jayawijaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
447	Kab. Merauke	2.000.000.000	920.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	2.000.000.000	920.000.000
448	Kab. Mimika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
449	Kab. Nabire	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	2.000.000.000	-
450	Kab. Paniai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
451	Kab. Puncak Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
452	Kab. Kepulauan Yapen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
453	Kota Jayapura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
454	Kab. Sarmi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
455	Kab. Keerom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
456	Kab. Yahukimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
457	Kab. Pegunungan Bintang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
458	Kab. Tolikara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
459	Kab. Boven Digoel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
460	Kab. Mappi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
461	Kab. Asmat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
462	Kab. Waropen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
463	Kab. Supiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
464	Kab. Mamberamo Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
465	Kab. Mamberamo Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
466	Kab. Yalimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
467	Kab. Lanny Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
468	Kab. Nduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
469	Kab. Dogiyai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
470	Kab. Puncak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
471	Kab. Intan Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
472	Kab. Deiyai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
473	Provinsi Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
474	Kab. Halmahera Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
475	Kota Ternate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
476	Kab. Halmahera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
477	Kab. Halmahera Timur	576.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	576.000.000	-
478	Kab. Halmahera Selatan	1.998.000.000	1.998.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1.998.000.000	1.998.000.000
479	Kab. Halmahera Utara	4.968.000.000	2.876.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	4.968.000.000	2.876.000.000
480	Kab. Kepulauan Sula	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
481	Kota Tidore Kepulauan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
482	Kab. Pulau Morotai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
483	Kab. Pulau Taliabu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
484	Provinsi Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
485	Kab. Lebak	4.100.000.000	2.651.000.000	-	-	-	-	-	-	8.801.757.000	8.691.089.420	7.119.249.000	5.436.730.159	850.000.000	-	-	-	-	-			1.718.000.000	967.961.083	22.589.006.000	17.746.780.662
486	Kab. Pandeglang	-	-	148.627.000	63.518.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	148.627.000	63.518.000
487	Kab. Serang	-	-	90.349.000	48.275.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	90.349.000	48.275.000
488	Kab. Tangerang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
489	Kota Cilegon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
490	Kota Tangerang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
491	Kota Serang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
492	Kota Tangerang Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
493	Provinsi Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
494	Kab. Bangka	600.000.000	354.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	600.000.000	354.000.000
495	Kab. Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
496	Kota Pangkal Pinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
497	Kab. Bangka Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
498	Kab. Bangka Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
499	Kab. Bangka Barat	500.000.000	452.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	500.000.000	452.000.000
500	Kab. Belitung Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
501	Provinsi Gorontalo	-	-	-	-	1.739.495.000	1.234.701.108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1.739.495.000	1.234.701.108
502	Kab. Boalemo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
503	Kab. Gorontalo	1.000.000.000	-	-	-	7.879.372.000	6.476.024.823	-	-	350.000.000	308.800.000	2.560.750.000	2.141.056.250	425.000.000	-	-	-	-	-			-	-	12.215.122.000	8.925.881.073
504	Kota Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
505	Kab. Pohuwato	2.400.000.000	1.338.000.000	-	-	2.850.648.000	2.850.637.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	5.250.648.000	4.188.637.350
506	Kab. Bone Bolango	2.150.000.000	780.000.000	-	-	5.509.035.000	3.288.377.299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	7.659.035.000	4.068.377.299
507	Kab. Gorontalo Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
508	Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
509	Kab. Natuna	2.478.000.000	1.254.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	2.478.000.000	1.254.000.000
510	Kab. Kepulauan Anambas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
511	Kab. Karimun	1.720.000.000	1.070.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1.720.000.000	1.070.000.000
512	Kota Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
513	Kota Tanjung Pinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
514	Kab. Lingga	1.600.000.000	1.280.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1.600.000.000	1.280.000.000
515	Kab. Bintan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
516	Provinsi Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
517	Kab. Fak Fak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
518	Kab. Manokwari	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	600.000.000	-
519	Kab. Sorong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
520	Kota Sorong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
521	Kab. Raja Ampat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
522	Kab. Sorong Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
523	Kab. Teluk Bintuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
524	Kab. Teluk Wondama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
525	Kab. Kaimana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
526	Kab. Maybrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
527	Kab. Tambrauw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
528	Kab. Manokwari Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
529	Kab. Pegunungan Arfak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
530	Provinsi Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
531	Kab. Majene	2.160.000.000	1.002.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	2.160.000.000	1.002.000.000
532	Kab. Mamuju	3.842.000.000	3.767.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	3.842.000.000	3.767.000.000
533	Kab. Polewali Mandar	5.000.000.000	2.926.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	5.000.000.000	2.926.000.000
534	Kab. Mamasa	2.450.000.000	1.912.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	2.450.000.000	1.912.000.000
535	Kab. Pasangkayu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
536	Kab. Mamuju Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
537	Provinsi Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
538	Provinsi Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN HIBAH KEPADA DAERAH
Tahun 2023
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Hibah Jalan/Sanitasi Air Limbah		IPDMIP-IFAD		READSI		National Urban Water Supply Project		UPLAND IsDB		UPLAND IFAD		UPLAND		PCSP		Bio CF ISFL		MRT		Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah		Total Pagu Hibah	Total Realisasi Hibah
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)			(27)	(28)
539	Provinsi Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
540	Provinsi Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
541	Provinsi Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
542	Kab. Bulungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
543	Kab. Malinau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
544	Kab. Nunukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
545	Kota Tarakan	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	3.000.000.000	3.000.000.000
546	Kab. Tana Tidung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
Jumlah		989.065.000.000	819.485.415.761	44.417.110.000	15.055.373.710	82.438.381.000	71.580.572.463	2.231.598.000	2.231.598.000	97.133.918.000	78.072.627.010	88.693.582.000	75.794.058.045	14.172.500.000	-	89.906.813.000	89.906.811.006	31.802.922.000	##########	1.984.457.561.000	1.735.248.701.390	43.016.361.000	25.683.400.770	3.467.335.746.000	2.940.874.059.627

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT BA BUN 2023 AUDITED
Data Pagu dan Realisasi per tanggal 31 Desember 2023

No	Satker	Nama Satker	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Belanja			Capaian RO Target'	Realisasi Volume *)	Satuan	Progress Capaian RO **)	Keterangan
								Pagu	Realisasi	%					
BA 999.01															
1	960186	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	999.01.06	4088	9AA	001	Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri	426.800.000.000.000	409.574.250.961.211	95,96%	100	100	Persen	100%	Output kegiatan Pengelolaan Pembayaran Kewajiban Utang tercapai 100% dengan rincian pinjaman dan SBN sebagaimana pada lampiran LK BA 999.01 Tahun 2023
2	960186	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	999.01.06	4088	9AA	002	Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri	14.600.000.000.000	30.575.331.536.948	209,42%	100	100	Persen	100%	
3	960186	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	999.01.06	4088	9AA	003	Pembiayaan Utang Dalam Negeri	579.835.688.666.000	542.860.028.458.620	93,62%	100	100	Persen	100%	
4	960186	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	999.01.06	4088	9AA	004	Pembiayaan Utang Luar Negeri	79.426.064.437.000	81.450.306.790.493	102,55%	100	100	Persen	100%	
BA 999.02															
1	977263	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	999.02.07	4850	9BB	002	Pembayaran Tagihan *Banking Commission*	151.000.000	101.163.777	67%	100	100	persen	100%	
2	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	015	Pemberian Hibah kepada Sekreatriat the Organization of African, Caribbean, and Pacific States - Pelatihan Information, Communication, and Technology (ICT) (Persen)	357.250.000	357.249.500	100%	100	100	Persen	100%	
3	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	016	Pemberian Hibah kepada Fiji - Preliminary Study (Persen)	3.383.489.000	3.078.343.325	91%	100	100	Persen	100%	
4	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	019	Pemberian Hibah Kepada Negara-negara anggota CARICOM dan SICA - Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurangan Dampak Risiko Bencana Serta Adaptasi Perubahan Iklim Untuk Negara Anggota Caribbean Community (CARICOM) dan Central American (Persen)	3.199.603.000	3.192.992.230	100%	100	100	Persen	100%	
5	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	020	Pemberian Hibah Kepada Negara-negara Anggota MSG - Pelatihan Tahap Lanjutan di Bidang Perikanan Pesisir untuk negara-negara Anggota MSG (Persen)	1.411.751.000	1.020.815.345	72%	100	100	Persen	100%	
6	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	027	Pemberian Hibah Kepada Ethiopia - Bantuan Penanganan Dampak Krisis Kemanusiaan Akibat Kekeringan di Ethiopia (Persen)	2.152.500.000	2.152.500.000	100%	100	100	Persen	100%	
7	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	028	Pemberian Hibah Kepada Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam - Pelatihan Information and Communication Technology for Customs Automation and Single Window (Persen)	791.206.000	690.325.009	87%	100	100	Persen	100%	
8	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	029	Pemberian Hibah Kepada Papua Nugini - Feasibility Study dan DED Port Moresby General Hospital : mortuary redevelopment dan intensive care unit (Persen)	4.753.572.000	1.489.235.859	31%	100	100	Persen	100%	
9	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	030	Pemberian Hibah kepada Papua Nugini - West Sepik Integrated Development Project (Fase I) (Persen)	5.001.632.000	5.001.631.813	100%	100	100	Persen	100%	
10	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	031	Pemberian Hibah kepada Gambia - Revitalisasi Agricultural Rural Farmers Training Center (ARFTC) di Kota Jenoi (Persen)	4.071.000.000	3.256.800.000	80%	100	100	Persen	100%	
11	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	032	Pemberian Hibah KepadaTimor Leste - Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Timor Leste melalui Program Magang di Kementerian Perdagangan (Persen)	994.373.000	994.286.723	100%	100	100	Persen	100%	
12	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	033	Pemberian Hibah Kepada Timor Leste - Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Timor Leste melalui Program Pemagangan Lintas K/L Nasional (Persen)	3.825.145.000	3.347.450.347	88%	100	100	Persen	100%	
13	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	034	Global Fund - Penanggulangan HIV, Tuberkulosis, dan Malaria di Lingkup Global (Persen)	23.445.000.000	23.445.000.000	100%	100	100	Persen	100%	
14	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	035	Pemberian Hibah Kepada Nigeria - Dukungan Vaksinasi Tahap I untuk Rakyat Nigeria (Persen)	12.732.933.000	12.732.848.383	100%	100	100	Persen	100%	
15	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	036	Pemberian Hibah kepada Nigeria - Dukungan Vaksinasi Tahap II untuk Rakyat Nigeria (Persen)	14.746.834.000	14.746.834.000	100%	100	100	Persen	100%	
16	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	037	Pemberian Hibah Kepada Gambia - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Keprotokoleran dalam rangka mendukung pelaksanaan KTT ke-15 OKI di Gambia (Persen)	1.022.351.000	814.394.346	80%	100	100	Persen	100%	
17	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	038	Pemberian Hibah Kepada Kawasan Afrika (Guinea, Senegal, Burundi, Gambia, Tanzania, Zambia, Kenya, dan Somalia) - Pelatihan Agribisnis Padi bagi Petani, Penyuluh dan Pejabat Pertanian (Persen)	3.757.522.000	1.920.137.004	51%	100	100	Persen	100%	
18	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	039	Pemberian Hibah Kepada Tanzania - Peningkatan Kapasitas SDM Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Tema "Course on Coal and Mineral Mining Safety" (Persen)	4.316.875.000	3.379.697.236	78%	100	100	Persen	100%	
19	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	040	Pemberian Hibah Kepada Tanzania - Peningkatan Kapasitas Inspektur Pertambangan Gas Bumi dengan Tema "Natural Gas Transmission and Distribution Supervision" (Persen)	3.218.567.000	2.425.566.366	75%	100	100	Persen	100%	
20	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	041	Pemberian Hibah Kepada Somalia - Dukungan Peningkatan Pelayanan Kesehatan melalui Tele-Medicine untuk di East Africa University Hospital (CoFinancing dengan Islamic Development Bank) (Persen)	8.765.640.000	8.721.160.200	99%	100	100	Persen	100%	
21	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	044	Pemberian Hibah Dukungan Pendidikan Mahasiswa Pasca Sarjana Afghanistan (Persen)	1.803.195.000	649.399.880	36%	100	100	Persen	100%	
22	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	045	Pemberian Hibah kepada Solomon - Pelatihan Budidaya Ayam Broiler (Persen)	4.439.006.000	2.407.999.231	54%	100	100	Persen	100%	
23	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	046	Pemberian Hibah kepadaKenya - Pelatihan di Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Persen)	1.300.581.000	1.066.312.720	82%	100	100	Persen	100%	
24	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	047	Pemberian Hibah kepada Namibia - Pelatihan Training of Trainer (ToT) IMO Model Course 6.09 for Instructors Institute of Marine and Fisheries (Persen)	4.020.832.000	2.663.568.419	66%	100	100	Persen	100%	
25	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	048	Pemberian Hibah kepada wilayah Asia Pasifik - Lokakarya Vessel Search for Asia/Pacific Customs Administration Officers (Persen)	2.172.994.000	1.397.049.753	64%	100	100	Persen	100%	
26	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	049	Pemberian Hibah Kepada Timor Leste - Pelatihan Teknis Klasifikasi Barang, Nilai Pabean, dan Rules of Origin Untuk Pegawai Timor-Leste Customs Authority (Persen)	1.610.280.000	1.283.286.411	80%	100	100	Persen	100%	
27	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	050	Pemberian Hibah Pelatihan eksekutif: Customs Modernization Untuk Pegawai Timor-Leste Customs Authority (Persen)	411.954.000	379.115.190	92%	100	100	Persen	100%	
28	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	051	Pemberian Hibah Timor-Leste Financial Management Reform Program: Penyiapan Standard Akuntansi Pemerintah dan Swasta (Persen)	2.068.096.000	1.330.169.737	64%	100	100	Persen	100%	
29	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	052	Pemberian Hibah Kendaraan untuk Mendukung Operasional Sekretariat MSG (Persen)	2.139.410.000	1.625.716.508	76%	100	100	Persen	100%	
30	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	053	Pemberian Hibah Bantuan Kemanusiaan akibat kekeringan Kenya (Persen)	2.245.950.000	2.245.948.720	100%	100	100	Persen	100%	
31	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	054	Pemberian Hibah Kepada Ukraina - Pemulihan, Rekonstruksi, dan Reformasi Sektor Kesehatan bekerja sama dengan World Bank (Persen)	78.000.000.000	77.125.077.750	99%	100	100	Persen	100%	
32	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	055	Pemberian Hibah kepada Palestina - Penanganan Bencana Kemanusiaan Warga Sipil di Palestina (Persen)	31.900.000.000	30.242.392.995	95%	100	100	Persen	100%	
33	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	056	Pemberian Hibah kepada Myanmar - Bantuan Penanganan Dampak Krisis Kemanusiaan melalui AHA Center (Persen)	3.986.500.000	3.856.250.000	97%	100	100	Persen	100%	
BA 999.03															
1	955787	Satker Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	999.03.08	4063	9CA	009	Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Persen)	4.300.000.000.000	4.300.000.000.000	100%	100%	100%	Persen	100%	-
2	999303	Satker Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	999.03.08	4063	9CA	004	Penyaluran Dana Rehabilitasi Mangrove	800.000.000.000	800.000.000.000	100%	100%	100%	Persen	100%	-
3	961671	Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.03.08	4063	9CC	002	Rumah yang Dibiayai (Unit Rumah)	19.480.000.000.000	19.480.000.000.000	100%	220.000	229.000	Unit rumah	104%	-
4	961671	Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.03.08	5293	9CA	001	Debitur yang terfasilitasi dana bergulir lingkungan hidup (Debitur)	2.225.200.000.000	2.225.200.000.000	100%	106.663	3.257	Debitur	3%	Realisasi penerima manfaat BPDLH yang menerima fasilitas dana bergulir tahun 2023 sebanyak 3.257 debitur. Pengalihan dana reboisasi sebesar Rp2,2 T dilakukan pada bulan Desember 2023, sehingga BPDLH akan mengoptimalisasikan saldo Dana Reboisasi yang ada pada saat ini untuk penyaluran tahun 2024 dan 2025.
5	961671	Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.03.08	5295	9CA	001	Penyaluran Dana Abadi Penelitian (Persen)	5.000.000.000.000	5.000.000.000.000	100%	100%	100%	Persen	100%	-
6	961671	Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.03.08	5295	9CA	002	Penyaluran Dana Abadi Kebudayaan (Persen)	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	100%	100%	100%	Persen	100%	-
7	961671	Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.03.08	5295	9CA	003	Penyaluran Dana Abadi Perguruan Tinggi (Persen)	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000	100%	100%	100%	Persen	100%	-
8	961671	Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.03.08	5295	9CA	008	Penyaluran Dana Abadi Pendidikan (Persen)	10.000.000.000.000	10.000.000.000.000	100%	100%	100%	Persen	100%	-
9	970974	Satker Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	999.03.08	5294	9CD	003	Jumlah Jaminan pada Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi pada Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi	18.727.251.000	18.727.251.000	100%	2	2	Surat Jaminan	100%	-
10	970974	Satker Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	999.03.08	5294	9CD	004	Jaminan pada Percepatan Pembangunan Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara	7.702.826.000	7.702.826.000	100%	5	5	Surat Jaminan	100%	-
11	970974	Satker Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	999.03.08	5294	9CD	005	Jaminan pada Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha melalui Badan Usaha Penjamin Infrastruktur	159.828.050.000	159.828.050.000	100%	7	7	Perjanjian Jaminan	100%	-

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT BA BUN 2023 AUDITED
Data Pagu dan Realisasi per tanggal 31 Desember 2023

No	Satker	Nama Satker	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Belanja			Capaian RO Target	Realisasi Volume *)	Satuan	Progress Capaian RO **)	Keterangan
								Pagu	Realisasi	%					
12	970974	Satker Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	999.03.08	5294	9CD	006	Jaminan pada Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara	6.744.701.000	6.744.701.000	100%	10	10	Surat Jaminan	100%	-
13	970974	Satker Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	999.03.08	5294	9CD	007	Jaminan pada Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	96.767.407.000	96.767.407.000	100%	11	11	Surat Jaminan	100%	-
14	970974	Satker Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	999.03.08	5294	9CD	008	Jaminan dalam rangka Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW	6.381.270.000	6.381.270.000	100%	2	2	Jaminan	100%	-
15	977191	Satker Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	999.03.08	4098	9CB	003	Serapan Anggaran PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (Persen)	1.530.000.000.000	1.530.000.000.000	100%	100%	100%	Persen	100%	-
16	979015	Satker Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.03.08	4105	9CA	006	Penempatan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (Persen)	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	100%	100%	100%	Persen	100%	-
17	984125	Satker Lembaga Manajemen Aset Negara	999.03.08	4860	9CA	007	Tanah PSN yang Dibiayai (m2)	25.424.000.000.000	25.424.000.000.000	100%	58.503.426	58.503.426	m2	100%	Realisasi pengeluaran pembiayaan yang menambah saldo dana jangka panjang sebesar Rp25,424 T diatribusi oleh estimasi luasan tanah yang akan diperoleh menggunakan dana tersebut yaitu sebsar 58.503.426m2. Dana tersebut telah co-mingle dengan dana-dana tahun sebelumnya. Realisasi disbursement LMAN yang kemudian disahkan menjadi penerimaan pembiayaan sebesar Rp18.207.083.934.327 diatribusi oleh luasan tanah 35.111.731m2. Mempertimbangkan bahwa capaian Rincian Output (RO) adalah yang mengatribusi angka pengeluaran pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) maka volume capaian RO yang akan dilaporkan sebagai bagian kinerja LRA adalah sesuai yang tercantum dalam DIPA yaitu 58.503.426m2. Adapun terkait capaian perolehan luasan lahan di tahun 2023 yang mengatribusi disbursement Rp18.207.083.934.327 telah diungkapkan pada Catatan Penting Lainnya dan rinciannya diungkapkan pada lampiran laporan keuangan.
18	984393	Satker Badan Kebijakan Fiskal	999.03.08	4103	9CC	002	Tambahan Investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional (Organisasi/LKI/BUI)	1.559.634.510.000	1.559.632.528.929	100%	6	6	Organisasi/LKI/BUI	100%	-
19	986917	Satker Kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	999.03.08	4098	9CB	001	Serapan Anggaran PMN kepada PT Hutama Karya (Persero) (Persen)	28.884.000.000.000	28.884.000.000.000	100%	100%	100%	Persen	100%	-
20	986917	Satker Kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	999.03.08	4098	9CB	002	Serapan Anggaran PMN kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Persen)	10.000.000.000.000	-	0%	100%	0%	Persen	0%	PP Pencairan PMN tidak Diterbitkan
21	986917	Satker Kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	999.03.08	4098	9CB	013	Serapan Anggaran PMN kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (Persen)	2.564.710.242.000	2.564.710.241.052	100%	100%	100%	Persen	100%	-
22	986917	Satker Kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	999.03.08	4098	9CB	014	Serapan Anggaran PMN kepada PT Len Industri (Persero) (Persen)	2.210.253.223.000	2.210.253.222.285	100%	100%	100%	Persen	100%	-
23	986917	Satker Kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	999.03.08	4098	9CB	015	Serapan Anggaran PMN kepada Perum LPPNPI/Airnav Indonesia (Persen)	659.190.000.000	659.190.000.000	100%	100%	100%	Persen	100%	-
24	986917	Satker Kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	999.03.08	4098	9CB	015	Serapan Anggaran PMN kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (Persen)	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000	100%	100%	100%	Persen	100%	-
25	986917	Satker Kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	999.03.08	4098	9CB	015	Serapan Anggaran PMN kepada PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) (Persen)	1.014.200.000.000	1.014.200.000.000	100%	100%	100%	Persen	100%	-
26	986917	Satker Kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	999.03.08	4098	9CB	015	Serapan Anggaran Investasi Non Permanen Kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	1.047.519.139.000	1.047.519.139.000	100%	100%	100%	Persen	100%	-
27	999986	Satker Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Pengelolaan Risiko Keuangan Negara)	999.03.08	5294	9CD	009	Jaminan Penugasan kepada BUMN dalam rangka Pembiayaan Infrastruktur Daerah	34.360.000.000	34.360.000.000	100%	1	1	Penjaminan	100%	-
BA 999.04															
1	977386	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.04.09	4065	9DA	001	Alokasi Penerusan Pinjaman Kepada BUMN	2.147.079.243.000	1.619.771.482.620	75,44%	7	7	Proyek	100%	
2	977386	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.04.09	4065	9DA	002	Alokasi Penerusan Pinjaman Kepada Pemda	295.220.000.000	286.227.630.138	96,95%	1	1	Proyek	100%	
BA 999.05															
DANA ALOKASI UMUM															
1	600007 s.d. 600195	Satker Penyalur Dana Transfer Umum	999.05.10	4092	9EB	004	621111 Transfer DAU tidak ditentukan penggunaannya	286.767.838.717.000	238.093.317.092.900	83,03%	545	545	Daerah	100,0%	
2	600007 s.d. 600195	Satker Penyalur Dana Transfer Umum	999.05.10	4092	9EB	007	621121 Transfer DAU Penggajian Formasi PPPK	25.741.997.004.000	567.506.998.555	2,20%	545	348	Daerah	63,85%	Data Output menggunakan jumlah daerah penerima dikarenakan realisasi output DAU 2023 masih belum dapat diidentifikasi
3	600007 s.d. 600195	Satker Penyalur Dana Transfer Umum	999.05.10	4092	9EB	008	621122 Transfer DAU Pendanaan Kelurahan	1.669.979.718.000	1.394.468.933.624	83,50%	411	399	Daerah	97,08%	
4	600007 s.d. 600195	Satker Penyalur Dana Transfer Umum	999.05.10	4092	9EB	009	621123 Transfer DAU Bidang Pendidikan	40.062.746.791.000	30.781.892.334.000	76,83%	535	535	Daerah	100%	
5	600007 s.d. 600195	Satker Penyalur Dana Transfer Umum	999.05.10	4092	9EB	010	621124 Transfer DAU Bidang Kesehatan	26.031.470.651.000	20.477.032.613.240	78,66%	534	534	Daerah	100%	
6	600007 s.d. 600195	Satker Penyalur Dana Transfer Umum	999.05.10	4092	9EB	011	621125 Transfer DAU Bidang Pekerjaan Umum	15.725.967.119.000	12.193.846.005.900	77,54%	534	534	Daerah	100%	
DANA BAGI HASIL (SDA)															
1	600007 s.d. 600195	Satker Penyalur Dana Transfer Umum	999.05.10	4068	9EB	001	6121 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi	13.057.307.573.000	13.057.307.573.000	100,00%	346	346	Daerah	100%	Data Output menggunakan jumlah daerah penerima dikarenakan realisasi output DBH 2023 masih belum dapat diidentifikasi
2	600007 s.d. 600195	Satker Penyalur Dana Transfer Umum	999.05.10	4068	9EB	001	6122 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi	7.573.702.907.000	7.573.702.907.000	100,00%	304	304	Daerah	100%	
3	600007 s.d. 600195	Satker Penyalur Dana Transfer Umum	999.05.10	4068	9EB	001	6123 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	69.998.028.214.000	69.998.028.214.000	100,00%	519	519	Daerah	100%	
4	600007 s.d. 600195	Satker Penyalur Dana Transfer Umum	999.05.10	4068	9EB	001	6124 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi	1.433.032.704.000	1.433.032.704.000	100,00%	288	288	Daerah	100%	
5	600007 s.d. 600195	Satker Penyalur Dana Transfer Umum	999.05.10	4068	9EB	001	6125 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	1.686.082.594.000	1.556.433.894.100	92,31%	522	522	Daerah	100%	
6	600007 s.d. 600195	Satker Penyalur Dana Transfer Umum	999.05.10	4068	9EB	002	6126 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	1.095.637.785.000	1.095.637.785.000	100,00%	509	509	Daerah	100%	
DANA BAGI HASIL (NON SDA)															
1	600007 s.d. 600195	Satker Penyalur Dana Transfer Umum	9990510	4068	9EB	001	611111 Transfer DBH PPh Pasal 21	28.430.567.768.000	28.430.567.768.000	100,00%	546	546	Daerah	100%	
2	600007 s.d. 600195	Satker Penyalur Dana Transfer Umum	9990510	4068	9EB	001	611112 Transfer DBH PPh Pasal 25/29	2.251.130.036.000	2.251.130.036.000	100,00%	546	546	Daerah	100%	
3	600007 s.d. 600195	Satker Penyalur Dana Transfer Umum	9990510	4068	9EB	001	611211 Transfer DBH PBB Provinsi	2.558.682.246.000	2.558.682.246.000	100,00%	38	38	Daerah	100%	
4	600007 s.d. 600195	Satker Penyalur Dana Transfer Umum	9990510	4068	9EB	001	611212 Transfer DBH PBB Kabupaten/Kota	13.419.401.480.000	13.419.401.480.000	100,00%	508	508	Daerah	100%	
5	600007 s.d. 600195	Satker Penyalur Dana Transfer Umum	9990510	4068	9EB	001	613111 Transfer DBH CHT	5.470.207.767.000	5.378.020.789.530	98,31%	427	331	Daerah	77,52%	
6	600007 s.d. 600195	Satker Penyalur Dana Transfer Umum	9990510	4068	9EB	002	612711 Transfer DBH Perkebunan Sawit	3.204.776.508.000	3.204.776.508.000	100,00%	350	350	Daerah	100%	
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK															
1	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EH		Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Broncaptering/Sumur Dalam Terlindungi	1.951.800.000.000	1.830.797.280.205	94%	496	491	SR	98,99%	
2	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EH		Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/ Broncaptering				746	745	SR	99,87%	
3	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EH		Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR)				960	946	SR	98,54%	
4	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EH		Pengadaan Mesin dan Peralatan				189	104	Paket	55,03%	
5	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EH		Pembangunan Infrastruktur Penunjang di dalam Sentra IKM	450.000.000.000	398.053.146.865	88%	11	11	Paket	100%	

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT BA BUN 2023 AUDITED
Data Pagu dan Realisasi per tanggal 31 Desember 2023

No	Satker	Nama Satker	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Belanja			Capaian RO Target	Realisasi Volume *)	Satuan	Progress Capaian RO **)	Keterangan
								Pagu	Realisasi	%					
6	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EH		Pembangunan/ Revitalisasi Sarana Produksi				59	56	Paket	94,92%	
7	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EH		Pembangunan PLTS Terpusat Offgrid	88.000.000.000	87.215.780.515	99%	11	11	MW	100%	
8	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EG		Rehabilitasi Jaringan Irigasi				106	106	Hektar	100%	
9	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EG		Peningkatan Jaringan Irigasi	1.688.944.553.000	1.507.510.515.757	89%	130	130	Hektar	100%	
10	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EG		Rehabilitasi Jaringan Irigasi				348	344	Hektar	98,85%	
11	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EF		Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi)				730	728	km	99,73%	
12	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EF		Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi)	12.617.759.056.000	12.162.540.594.920	96%	125	123	km	98,40%	
13	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EF		Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi)				185	182	km	98,38%	
14	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EG		Sarana dan Prasarana (Sarpras) Alat Ekonomi Produktif				51	23	Paket	45,10%	
15	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EG		Pembangunan Dam Penahan	32.000.000.000	29.220.059.595	91%	109	109	Unit	100%	
16	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EG		Pembangunan Gully Plug				71	71	Unit	100%	
17	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EG		Penyediaan Calon Induk Unggul dan Pakan Calon Induk				65	61	Paket	93,85%	
18	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EG		Rehabilitasi Kolam atau bak Pemijahan/induk/ calon induk/ larva/tandon	1.234.900.000.000	1.120.669.462.214	91%	65	63	Meter Persegi	96,92%	
19	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EG		Peralatan dan Mesin Menunjang Pendataan dan Penangkapan Ikan Terukur				62	54	Paket	87,10%	
20	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9ED		Pembangunan/Rehab/Kelengkapan Balai Penyuluhan KB				5605	4580	Paket	81,71%	
21	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9ED		Alat kegawatdaruratan maternal neonatal	13.400.000.000.000	12.376.619.051.710	92%	9431	3427	Paket	36,34%	
22	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9ED		Alat antropometri				5498	2781	Paket	50,58%	
23	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EG		Pengadaan unit pemantauan kualitas air secara otomatis dan online di DAS prioritas/danau prioritas/sungai tercemar berat yang mendukung penguatan DPP (bangunan dan alat)				21	10	Paket	47,62%	
24	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EG		Pengadaan Kontainer Sampah Kapasitas 6 m3	154.956.000.000	146.853.293.816	95%	47	29	Unit	61,70%	
25	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EG		Penyediaan Alat Angkut Sampah (Motor Roda 3 kapasitas 0,7 ton dan Gerobak Pilah 0,3 ton)				65	37	Paket	56,92%	
26	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EH		Fasilitas Aksesibilitas				55	52	Paket	94,55%	
27	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EH		Fasilitas Rekreasi Penunjang Kegiatan Wisata	450.000.000.000	349.057.002.092	78%	42	42	Paket	100,00%	
28	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EH		Fasilitas Umum				32	31	Paket	96,88%	
29	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EC		Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya				6235	5798	Ruang	92,99%	
30	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EC		Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	15.820.300.000.000	15.095.592.187.700	95%	2647	2482	Ruang	93,77%	
31	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EC		Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya				307	285	Ruang	92,83%	
32	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EH		Pembangunan pasar rakyat tematik wisata	150.000.000.000	149.622.533.098	100%	3	3	Unit	100%	
33	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EF		Pembangunan Jalan Usaha Tani Sektor Tanaman Pangan				183	183	Unit	100%	
34	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EG		Sarana pascapanen	2.363.652.413.000	2.174.853.051.003	92%	606	366	Paket	60,40%	
35	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081			Sarana pra panen				511	308	Paket	60,27%	
36	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EH		Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan				31	31	Meter	100%	
37	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EH		Pembangunan Baru Rumah Swadaya	160.651.813.000	137.324.360.524	85%	15	15	Unit	100%	
38	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EH		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya				17	17	Unit	100%	
39	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EH		Pembangunan tangki septik komunal (5-10 KK)				199	199	SR	100%	
40	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EH		Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK	1.569.500.000.000	1.550.016.807.373	99%	1942	1941	Unit	99,95%	
41	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EH		Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK				212	212	SR	100%	
42	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EF		Pembangunan Bus Air Roro				11	11	Unit	100%	
43	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EF		Rehabilitasi Fasilitas Sisi Darat	440.000.000.000	401.797.186.095	91%	27	25	Paket	92,59%	
44	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EF		Rehabilitasi Fasilitas Sisi Perairan				26	26	Paket	100%	
45	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EF		Pembangunan Jalan Desa Strategis				78	76	km	97,44%	
46	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EF		Peningkatan Jalan Desa Strategis	750.000.000.000	722.014.296.662	96%	57	57	km	100%	
47	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EF		Pengadaan Sarana Transportasi Darat				51	26	Unit	50,98%	
48	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EH		Fasilitasi Sarana Prasarana				177	110	Paket	62,15%	

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT BA BUN 2023 AUDITED
Data Pagu dan Realisasi per tanggal 31 Desember 2023

No	Satker	Nama Satker	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Belanja			Capaian RO Target	Realisasi Volume *)	Satuan	Progress Capaian RO **)	Keterangan
								Pagu	Realisasi	%					
49	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EH		Pematangan Lahan	100.000.000.000	94.984.737.161	95%	3	2	Paket	66,67%	
50	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EH		Pembangunan Gedung PLUT				14	14	Paket	100%	
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK															
1	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4093	9EI	001 dan 015	Dana BOS	53.441.572.210.000	53.094.493.053.145	99,35%	43.782.293	43.764.401	Peserta Didik	99,96%	
2	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4093	9EI	002 dan 029	Dana BOP PAUD	4.119.098.130.000	4.084.456.893.769	99,16%	6.342.496	6.316.400	Peserta Didik	99,59%	
3	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4093	9EI	010 dan 030	Dana BOP Kesetaraan	1.494.568.960.000	1.476.668.917.036	98,80%	823.154	817.717	Peserta Didik	99,34%	
4	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4093	9EI	003	Dana TPG	53.337.282.097.000	27.691.026.427.700	51,92%	1.109.253	1.025.246	Guru	92,43%	
5	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4093	9EI	004	Dana Tamsil	1.309.031.712.000	682.599.026.834	52,15%	527.380	505.149	Guru	95,78%	
6	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4093	9EI	005	Dana TKG	2.005.621.483.000	825.527.078.357	41,16%	43.206	41.701	Guru	96,52%	
7	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4093	9EI	011 dan 016	Dana BOP MTB	169.975.000.000	169.975.000.000	100,00%	121	61	Museum dan Taman Budaya	50%	
8	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4093	9EI	006 dan '031	Dana BOK	12.878.672.152.000	12.412.991.969.900	96,38%	541	541	Dinas Kesehatan	12,60%	
9	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4093	9EI	007	Dana BOKB	3.239.300.000.000	3.230.739.603.000	99,74%	6239	5914	Balai Penyuluhan KB	94,79%	
10	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4093	9EI	008	Dana PK2UMK	250.000.000.000	249.210.260.000	99,68%	384	206	Peserta Pelatihan	53,65%	
11	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4093	9EI	012	Dana Kepariwisataan	133.300.000.000	131.787.586.500	98,87%	32280	17090	Peserta Pelatihan	52,94%	output s.d. tahap I 2023
12	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4093	9EI	013	Dana BLPS	65.827.750.000	62.003.157.725	94,19%	1	1	Daerah	100,00%	
13	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4093	9EI	010	Dana PPPA	132.000.000.000	128.562.300.000	97,40%	275	261	Pemerintah Daerah	94,91%	
14	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4093	9EI	020	Dana FPM	250.000.000.000	247.386.450.000	98,95%	542	170	Pelaku Usaha	31,37%	
15	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4093	9EI	021	Dana KPP	300.045.000.000	292.704.050.000	97,55%	1236	1132	Kelompok Masyarakat	91,59%	output s.d. tahap I 2023
16	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4093	9EI	022	Dana PK2SIKM	200.000.000.000	192.875.000.000	96,44%	68	62	Sentra IKM	91,18%	
HIBAH KE DAERAH															
1	600006	KPPN Jakarta I Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	6947	9BA	003	Pembayaran Tagihan Hibah Jalan Daerah	293.000.000.000	274.657.782.236	93,7%	421,88	501,7	Pemeliharaan jalan daerah (km)		
2	600006	KPPN Jakarta I Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	6949	9BA	005	Pembayaran Tagihan Hibah Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang	89.906.813.000	89.906.811.006	100,0%	100	100	Pembangunan IPALD dan stasiun pompa (%)		
3	600006	KPPN Jakarta I Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	6951	9BA	009	Pembayaran Tagihan Hibah Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP - I	44.417.110.000	15.055.373.710	33,9%	92.775	31.446	Pelatihan kepada petani (petani)		
4	600006	KPPN Jakarta I Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	6952	9BA	010	Pembayaran Tagihan Hibah Mass Rapid Transit (MRT) Project	1.984.457.561.000	1.735.248.701.390	87,4%	27,75	29,42	Pembangunan jalur MRT Jakarta Fase 2A (%)		
5	600006	KPPN Jakarta I Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	6954	9BA	012	Pembayaran Tagihan Hibah Sanitasi/Air Limbah Setempat (Rupiah Murni)	150.000.000.000	118.388.860.343	78,9%	25.000	19.902	Tangki Septik pada Rumah Terlayani (RT)		
6	600006	KPPN Jakarta I Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	6956	9BA	001	Pembayaran Tagihan Hibah Bi Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (Bio CF ISFL)	31.802.922.000	27.815.501.472	87,5%	9	16,1	Penurunan emisi GRK Bersih (MtCO2e)		
7	600006	KPPN Jakarta I Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	6957	9BA	014	Pembayaran Tagihan Hibah Air Minum Berbasis Kinerja (National Urban Water Supply Project)	2.231.598.000	2.231.598.000	100,0%	2	2	Peningkatan kinerja, efisiensi operasi dan keuangan pada PDAM (PDAM)		
8	600006	KPPN Jakarta I Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	6957	9BA	015	Pembayaran Tagihan Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia	43.016.361.000	25.683.400.770	59,7%	17	16	Peningkatan kinerja tata kelola, efisiensi operasi dan keuangan, serta kualitas pelayanan pada PDAM (PDAM)		
9	600006	KPPN Jakarta I Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	6958	9BA	016	Pembayaran Tagihan Hibah Air Minum (Rupiah Murni)/Nationwide Water Hibah Program	546.065.000.000	426.438.773.182	78,1%	214.464	166.217	Sambungan Rumah (SR)		
10	600006	KPPN Jakarta I Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	6959	.9BA	017	Pembayaran Tagihan Hibah Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling up Initiative (READ-SI)	82.438.381.000	71.580.572.463	86,8%	35.675	30.976	Sekolah lapang lanjutan (Petani)		
11	600006	KPPN Jakarta I Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	6959	9BA	018	Pembayaran Tagihan Hibah The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)	200.000.000.000	153.866.685.055	76,9%	87	86	Pembangunan jalan usaha tani (km)		
DANA DESA INSENTIF OTONOMI KHUSUS (DDIOK)															
1	-	DJPK	999.05.10	5323	9EJ	001	Pengelolaan Dana Desa	70.000.000.000.000	69.856.768.617.317	99,80%	100	100	Persen	99,97%	450 Bumdes, 33.656 km jalan desa, 2.248 Polindes, 515 unit pasar desa
2	-	DJPK	999.05.10	5869	9EB	005	Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Sebelumnya yang disalurkan	3.000.000.000.000	2.054.875.766.000	68,50%	147	147	Daerah	100%	
3	-	DJPK	999.05.10	5869	9EB	012	Alokasi Insentif Fiskal Daerah Tertinggal Kinerja Tahun Sebelumnya yang disalurkan	1.000.000.000.000	591.007.582.000	59,10%	62	62	Daerah	100%	
4	-	DJPK	999.05.10	5869	9EK	006	Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan yang disalurkan	4.000.000.000.000	180.434.812.000	4,51%	338	36	Daerah	10,65%	
5	-	DJPK	999.05.10	5322	9EA	006	Alokasi Dana Keistimewaaan DIY yang disalurkan	1.420.000.000.000	1.372.725.809.224	96,67%	100	97	Persen	96,67%	
6	-	DJPK	999.05.10	4067	9EA	001	Alokasi Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum yang disalurkan	220.157.251.930	84.138.720.562	38,22%	576	491	Unit	85,33%	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni
7	-	DJPK	999.05.10	4067	9EA	002	Alokasi Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya yang disalurkan	224.481.337.500	113.902.409.650	50,74%	1967	276	Orang	14,03%	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Pendidikan Tinggi
8	-	DJPK	999.05.10	4067	9EA	003	Alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh yang disalurkan	290.733.674.773	251.073.418.423	86,36%	336	336	Dyh/Keg	100%	Terlaksananya Pembangunan Prasarana dan Penyediaan Sarana Dayah
9	-	DJPK	999.05.10	4067	9EA	004	Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur yang disalurkan	1.829.480.469.590	494.519.251.744	27,03%	11537	2031	Km	17,61%	Pembangunan Jalan
BA 999.07															
1	999701	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	999.07.11	4862	9FB	006	Subsidi IJP Pelaku Usaha Korporasi dan IJP Loss Limit Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	157.090.578.000	136.470.709.444	86,87%	2	2	Penjamin	100%	Capaian rincian output Subsidi IJP Pelaku Usaha Korporasi dan IJP Loss Limit Program PEN dan Subsidi IJP UMKM Program PEN tercapai 100% dengan rincian masing-masing 2 Penjamin yaitu, LPEI dan PT. PII (Korporasi) serta PT. Jamkrindo dan PT. Askrindo (UMKM)
2	999701	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	999.07.11	4863	9FB	001	Subsidi IJP UMKM Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	1.247.003.053.000	1.244.179.548.834	99,77%	2	2	Penjamin	100%	
3	980522	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	999.07.11	4861	9FC	002	Subsidi PPh DTP SBN Valas	5.076.940.000.000	2.707.880.270.038	53,34%	1	1	Wajibpajak	100%	Pembayaran Kurang Bayar Subsidi PPh DTP SBN Valas telah dilakukan kepada Wajib Pajak penerima manfaat
4	980522	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	999.07.11	4861	9FC	003	Subsidi PPH DTP Penghapusan Utang PDAM	129.621.000	-	0,00%	1	0	Wajibpajak	0	Tidak terdapat realisasi subsidi PPh DTP Penghapusan Piutang PDAM
5	980522	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	999.07.11	4861	9FC	001	Subsidi PPh DTP Panas Bumi	2.810.100.000.000	2.810.100.000.000	100,00%	9	9	Wajibpajak	100%	Pembayaran PPh DTP Panas Bumi telah dilakukan kepada Wajib Pajak penerima manfaat
6	956101	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	999.07.11	4862	9FA	005	Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG)	2.264.496.000	-	0,00%	988	465	Debitur	47,06%	Pembayaran subsidi resi gudang telah disalurkan kepada 465 debitur

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT BA BUN 2023 AUDITED
Data Pagu dan Realisasi per tanggal 31 Desember 2023

No	Satker	Nama Satker	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Belanja			Capaian RO Target	Realisasi Volume *)	Satuan	Progress Capaian RO **)	Keterangan
								Pagu	Realisasi	%					
7	962718	Direktorat Jenderal Cipta Karya	999.07.11	4871	9FB	001	Subsidi Bunga Air Bersih	4.594.331.000	577.649.532	12,57%	9	8	PDAM	88,89%	Pembayaran subsidi air bersih telah disalurkan kepada 8 PDAM (1 PDAM kota Palembang tidak mengajukan tagihan)
8	984149	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian	999.07.11	4865	9FA	001	Subsidi Pupuk	25.276.635.119.000	14.023.486.999.566	55,48%	6.680.286	6.040.669	Ton	90,43%	Volume pembayaran subsidi pupuk telah terealisasi sebesar 6.040.669 Ton
9	984192	Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik	999.07.11	4870	9FA	001	Subsidi PSO untuk Informasi Publik Bidang Pers	172.874.280.000	87.315.921.000	50,51%	173.000	156.830	Berita	90,65%	Volume pembayaran PSO telah terealisasi sebanyak 156.830 berita dalam bentuk artikel, podcast, photostories, infografis
10	957337	Dikretorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan	999.07.11	4868	9FA	001	Subsidi PSO Kereta Api Kelas Ekonomi Antarkota	2.395.825.599.000	1.095.339.392.291	45,72%	8.697.346	4.006.659	Penumpang	46,07%	Volume pembayaran PSO Kereta Api Kelas Ekonomi Antarkota untuk melayani sebanyak 4.006.659 penumpang
11	957337	Dikretorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan	999.07.11	4868	9FA	002	Subsidi PSO Kereta Api Kelas Ekonomi Perkotaan	2.395.825.599.000	1.095.339.392.291	45,72%	275.233.076	308.867.347	Penumpang	112,22%	Volume pembayaran PSO Kereta Api Kelas Ekonomi Perkotaan untuk melayani sebanyak 308.867.347 penumpang
12	957337	Dikretorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan	999.07.11	4868	9FA	003	Subsidi PSO Kereta Api Ringan (LRT) Jabodebek	2.395.825.599.000	1.095.339.392.291	45,72%	12.735.928	4.423.151	Penumpang	34,73%	Volume pembayaran PSO Kereta Api LRT Jabodebek untuk melayani sebanyak 4.423.151 penumpang
13	985120	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan	999.07.11	4869	9FA	001	Subsidi PSO Angkutan Laut Kelas Ekonomi	2.395.825.599.000	1.095.339.392.291	45,72%	4.563.277	4.264.748	Penumpang	93,46%	Volume pembayaran PSO Angkutan Laut Kelas Ekonomi untuk melayani sebanyak 4.264.748 penumpang
14	987252	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	999.07.11	4873	9FB	001	Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	895.000.000.000	616.922.000.000	68,93%	220.000	220.000	Unit	100,00%	Volume penyaluran subsidi bantuan uang muka perumahan sebanyak 220.000 unit
15	987252	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	999.07.11	4873	9FB	002	Subsidi Bunga Kredit Perumahan	3.457.520.000.000	2.673.243.550.690	77,32%	754.004	750.497	Unit	99,53%	Volume penyaluran subsidi bunga kredit perumahan sebanyak 750.497 unit
16	984620	Deputi Bidang Usaha Mikro	999.07.11	4863	9FB	002	Subsidi IJP KUR	3.457.520.000.000	2.673.243.550.690	77,32%	2	2	Penjamin	100%	Telah dilakukan pembayaran tagihan kepada 2 (dua) penjamin yaitu Askrindo dan Jamkrindo untuk Penjaminan KUR
17	984620	Deputi Bidang Usaha Mikro	999.07.11	4863	9FB	004	Subsidi Bunga KUR	3.457.520.000.000	2.673.243.550.690	77,32%	4.761.092	4.438.471	Debitur	93,22%	Dengan target debitur sebesar 4.761.092, telah disalurkan subsidi kepada 4.438.471 debitur
18	979321	Direktorat Jenderal Anggaran	999.07.11	4867	9FD	001	Subsidi Listrik	72.576.858.846.000	42.736.312.937.767	58,88%	637	620	TWH	97,33%	Telah disalurkan subsidi listrik dengan volume sebanyak 620 Tera Watt/hour
19	979321	Direktorat Jenderal Anggaran	999.07.11	4867	9FD	002	Subsidi Minyak Solar	17.000.000.000.000	11.114.380.888.856	65,38%	17.000.000	16.056.418	Kilo Liter	94,45%	Telah disalurkan subsidi solar dengan volume sebanyak 16 juta Kilo Liter
20	979321	Direktorat Jenderal Anggaran	999.07.11	4867	9FD	003	Subsidi Minyak Tanah	4.549.879.769.000	2.752.786.331.666	60,50%	500.000	448.109	Kilo Liter	89,62%	Telah disalurkan subsidi minyak tanah dengan volume sebanyak 5,3 ribu Kilo Liter
21	979321	Direktorat Jenderal Anggaran	999.07.11	4867	9FD	004	Subsidi LPG Tabung 3 Kg	117.849.387.429.000	46.457.915.948.234	39,42%	8.000.000	7.726.743	Metrik Ton	96,58%	Telah disalurkan subsidi minyak tanah dengan volume sebanyak 7,7 juta Metrik Ton
22	983783	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.07.11	4862	9FB	004	004 Subsidi Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)	41.205.000	41.204.433	100,00%	15	15	Debitur	100%	Realisasi pembayaran tunggakan 100% kepada 15 Debitur KUPS
23	983783	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.07.11	4862	9FB	008	Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	41.272.222.000	853.768.416	2,07%	2	1	Debitur	50,00%	Dari dua akad perjanjian dengan Perum BULOG, hanya satu akad kredit yang dicairkan, sehingga subsidi bunga pinjaman utk CPP hanya terealisasi 50%
24	999704	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.07.11	6454	9FB	001	Subsidi Bunga Pinjaman Daerah (PEN)	172.022.821.000	160.320.970.852	93,20%	31	29	Pemerintah Daerah	93,55%	Telah disalurkan subsidi bunga pinjaman daerah untuk 29 Pemda
BA 999.08															
1	962450	Istana Kepresidenan Jakarta	999.08.12	4096	9GA	001	Bantuan Kemasyarakatan Presiden	156.527.736.000	135.998.260.308	87%	1	1,00	Layanan	1	Realisasi untuk Banmas dilaksanakan berdasarkan perintah Presiden baik secara lisan maupun tertulis. Realisasi ini dapat dilaksanakan pada saat Kunker Presiden dan berdasarkan permohonan tertulis dalam bentuk proposal, surat, atau dokumen permintaan Banmas lain yang sejenis atau tanpa adanya permohonan. kegiatan meliputi kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan dan kegiatan lainnya.
2	999465	Sekretariat Wakil Presiden RI	999.08.12	4096	9GA	002	Bantuan Kemasyarakatan Wakil Presiden	31.503.248.000	31.408.183.486	100%	1	1,00	Layanan	1	Realisasi kegiatan Banmas Wapres telah mencapai 100% pada Desember 2023
3	984423	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	999.08.12	4886	9GA	001	Layanan Dukungan Manajemen Pengelolaan Kawasan Bintan dan Karimun	7.446.788.000	5.532.272.156	74%	1	1,00	Layanan	1	- Sewa Menyewa Kendaraan Operasional Pejabat/Pegawai, Sewa Gedung - Honorarium Kegiatan - Pemeliharaan PM (Komputer, AC dan lainnya) - Laporan Keuangan Per Semester, Triwulan, Tahunan - Pendidikan dan Pelatihan Teknis - Penyusunan Anggaran - Pengadaan Sarana dan Prasarana - Laporan Renstra
4	984423	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	999.08.12	4886	9GA	002	Pengusahaan Kawasan Sekretariat Dewan Kawasan PBPB Bintan dan Karimun	3.030.780.000	2.470.227.853	82%	1	1,00	Layanan	1	- Koordinasi dan Fasilitas Pengembangan Investasi di Kawasan PBPB Bintan dan Karimun - Promosi Publikasi
5	984423	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	999.08.12	4886	9GA	003	Layanan Dukungan Manajemen BP Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan	7.854.209.000	6.488.587.799	83%	1	0,92	Layanan	1	- Sewa Menyewa Kendaraan Operasional Pejabat/Pegawai, Sewa Gedung - Honorarium Kegiatan - Pemeliharaan PM (Komputer, AC dan lainnya) - Pengadaan Pakaian Kerja PPNPN - Pengadaan Peralatan Kantor - Sosialisasi Kegiatan Penanaman Modal
6	984423	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	999.08.12	4886	9GA	004	Pengusahaan Kawasan BP Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan	85.376.746.000	84.100.546.070	99%	1	1,00	Layanan	1	- 15 Pekerjaan Perencanaan Jalan dan PJU - 1 Pekerjaan Identifikasi Lahan - 11 Pekerjaan Peningkatan dan/atau Pembangunan Jalan dan PJU - 9 Pekerjaan Pengawasan Peningkatan dan/atau Pembangunan dan dan PJU - Promosi dalam dan Luar Negeri
7	984423	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	999.08.12	4886	9GA	005	Layanan Dukungan Manajemen BP Kawasam Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang	4.857.212.000	4.235.056.045	87%	1	1,00	Layanan	1	- Sewa Menyewa Kendaraan Operasional Pejabat/Pegawai, Sewa Gedung - Honorarium Kegiatan - Pemeliharaan PM (Komputer, AC dan lainnya) - Koordinasi terkait perkembangan Pelabuhan Tg. Mocco - Sosialisasi Kebijakan Perizinan dan Investasi - Peyediaan Sarana Prasarana Kantor
8	984423	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	999.08.12	4886	9GA	006	Pengusahaan Kawasan BP Kawasan Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang	63.889.507.000	63.040.542.982	99%	1	1,00	Layanan	1	- Promosi Dagang Dalam dan Luar Negeri - 8 Pekerjaan Perencanaan Teknis Pemeliharaan, Pembangunan dan/Atau Peningkatan Jalan dan PJU - 7 Pekerjaan Pengawasan Jalan dan PJU - 7 Pekerjaan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan untuk Jalan dan PJU - Dokumen Rencana Rinci Kawasan-Kawasan PBPB Bintan Wilko Tanjungpinang - Pemeliharaan Tanaman
9	984423	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	999.08.12	4886	9GA	007	Layanan Dukungan Manajemen BP Kawasan Karimun	8.495.530.000	6.741.729.459	79%	1	1,00	Layanan	1	- Sewa Menyewa Kendaraan Operasional Pejabat/Pegawai, Sewa Gedung - Honorarium Kegiatan - Pemeliharaan PM (Komputer, AC dan lainnya) - Pakaian Kerja PPNPN (Supir, Pramubakti, Satpam, Petugas Kebersihan) - Pengadaan Sarana dan Prasarana - Monev dan Sosialisai Kegiatan Penanaman Modal
10	984423	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	999.08.12	4886	9GA	008	Pengusahaan Kawasan BP Kawasan Karimun	65.491.851.000	63.993.659.568	98%	1	1,00	Layanan	1	- 5 Pekerjaan Peningkatan Jalan beserta Pengawasannya - Perencanaan dan Pengawasan Pemelihraan Taman dan Jalan - Pembangunan Gazebo

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT BA BUN 2023 AUDITED
Data Pagu dan Realisasi per tanggal 31 Desember 2023

No	Satker	Nama Satker	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Belanja			Capaian RO Target	Realisasi Volume *)	Satuan	Progress Capaian RO **)	Keterangan
								Pagu	Realisasi	%					
11	984526	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika KOMINFO	999.08.12	4893	9GA	001	Layanan Pos Universal	378.269.521.000	366.120.584.924	97%	2460	2460,00	KPC LPU	1	- Gaji pegawai sebanyak 2.920 kantor LPU - Sewa kantor sebanyak 904 kantor LPU, sewa kendaraan roda dua sebanyak 103 sepeda motor, dan Mitra LPU sebanyak 1.322 Mitra - biaya pemeliharaan 293 kantor LPU, kebersihan pada 2.460 kantor LPU - biaya listrik, telepon dan air pada 2.460 kantor LPU
12	999255	Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja	999.08.12	4967	9GA	002	Pelatihan Program Kartu Prakerja	4.200.000.000.000	2.609.685.763.700	62%	1151833	1151833,00	Peserta	1	MPPKP telah menetapkan Selama Tahun anggaran 2023 sebanyak : 1.272.177 Peserta dan mencabut peserta sebanyak : 120.344
13	999255	Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja	999.08.12	4967	9GA	003	Layanan Dukungan Manajemen Program Kartu Prakerja	171.000.000.000	152.308.358.281	89%	1	1,00	Layanan	1	
14	999292	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua	999.08.12	4887	9GA	001	Ongkos angkut beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua	145.036.314.000	115.898.315.312	80%	25	25,00	Kabupaten	1	Volume Kontrak 15.304.310 kg, SO Bulog yang diterima 15.213.390 kg dan Beras yang telah didistribusikan 15.213.390 kg
15	999510	Direktorat Jenderal Anggaran	999.08.12	4966	9GA	001	Penyelesaian Utang Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran BBM	133.123.621.611.000	133.123.621.605.637	100%	1	1,00	Laporan	1	Telah diproses penyelesaian Penyelesaian Utang Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran BBM dan Tarif Tenaga Listrik
16	999510	Direktorat Jenderal Anggaran	999.08.12	4967	9GA	002	Penyelesaian Utang Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Tarif Tenaga Listrik	72.949.871.533.000	72.949.871.530.177	100%	1	1,00	Laporan	1	Telah diproses penyelesaian Penyelesaian Utang Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran BBM dan Tarif Tenaga Listrik
17	999975	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi	999.08.12	4892	9GA	001	Layanan Dukungan Manajemen Pengawasan dan Pengembangan Industri Hulu Migas	1.452.983.773.000	1.446.516.429.750	99,55%	1	1,00	Layanan	100%	Rincian Capaian KPI SKK Migas antara lain: - Reserves Replacement Ratio 123,50% dari target 100% - Lifting Minyak & Kondensat 605,5 ribu dari target 660 ribu; Lifting Gas 960,4 ribu dari target 1.100 - Pengendalian Cost Recovery 7,67 Miliar dari target 8,25 Miliar - Penerimaan Negara14,59 Miliar dari target 15,88 Miliar - Penyelesaian Kegiatan Proyek Strategi Nasional: Proyek UCC BP Tangguh, Tangguh Train-3, Abadi, IDD - Proyek Onstream - Proyek Strategis Hulu Migas
18	999975	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi	999.08.12	4893	9GA	002	Layanan Industri Hulu Migas	266.676.620.000	256.269.164.943	96,10%	4	4,00	Layanan	100%	
19	999976	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat	999.08.12	4888	9GA	001	Ongkos angkut beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat	17.418.606.000	16.792.674.340	96%	12	12,00	Kabupaten	1	Volume Kontrak 7.472.042 kg, SO Bulog yang diterima 7.007.830 kg dan Beras yang telah didistribusikan 7.007.830 kg
20	999801	Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan	999.08.12	4109	9GA	002	Cadangan Pangan Pemerintah	12.875.144.609.000	12.875.144.605.421	100%	2987091331	2987091331,00	Kilogram	1	Jumlah beras yang disalurkan sebanyak 2.987.091.331 kg berdasarkan hasil reviu dari BPK/BPKP/APIP
BA 999.99															
1	987361	Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.99.13	4899	9HD	001	Manfaat Pensiun dan Cicilan UPSL Program THT yang disalurkan (Peserta)	140.518.156.055.000	140.460.140.757.039	99,96%	3.657.276	4.043.989	Peserta	110,57%	Jumlah rata-rata peserta dalam setahun
2	987361	Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.99.13	4899	9HD	002	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja yang disalurkan (Peserta)	294.187.729.000	294.187.728.596	100,00%	12.268.509	11.061.076	Peserta	90,16%	Jumlah rata-rata peserta dalam setahun
3	987361	Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.99.13	4899	9HD	003	Iuran Asuransi Kesehatan yang disalurkan (Peserta)	10.031.079.512.000	10.031.079.509.664	100,00%	4.085.180	4.333.652	Peserta	106,08%	Jumlah rata-rata peserta dalam setahun
4	987361	Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.99.13	4899	9HD	004	Iuran Jamkesmen dan Jamkestama yang disalurkan (Peserta)	283.280.824.000	280.506.819.628	99,02%	7.073	6.431	Peserta	90,92%	Jumlah rata-rata peserta dalam setahun
5	987361	Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.99.13	4899	9HD	005	Iuran Jaminan Kematian Kerja yang disalurkan (Peserta)	535.249.696.000	535.249.695.404	100,00%	12.268.509	11.061.076	Peserta	90,16%	Jumlah rata-rata peserta dalam setahun
6	987361	Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.99.13	4899	9HD	007	Biaya Operasional Penyelenggaraan yang disalurkan (Peserta)	801.660.591.000	709.040.117.878	88,45%	3.605.796	3.962.896	Peserta	109,90%	Jumlah rata-rata peserta dalam setahun
7	987361	Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.99.13	4900	9HE	001	Alokasi Selisih Harga Beras Bulog yang disalurkan	121.245.800.000	121.245.799.637	100,00%	34.888.346	34.888.346	Kg	100%	Jumlah peserta total dalam setahun
8	987361	Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.99.13	4902	9HF	001	Alokasi PPN BI RTGS/SWIFT yang disalurkan (Transaksi)	67.097.000	-	0,00%	17.329	-	Transaksi	0,00%	
9	987361	Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.99.13	4902	9HF	002	Alokasi Bunga Negatif yang disalurkan (Transaksi)	36.000.000	24.323.189	67,56%	12	12	Transaksi	100%	Jumlah peserta total dalam setahun
10	987361	Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.99.13	4902	9HF	003	Alokasi Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi/Lainnya yang disalurkan (Transaksi)	360.288.120.000	302.033.767.000	83,83%	127.701.732	104.574.018	Transaksi	81,89%	Jumlah peserta total dalam setahun
11	987361	Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.99.13	4902	9HF	004	Alokasi PPN Atas Transaksi RTGS BO yang disalurkan (Transaksi)	221.512.000	143.238.480	64,66%	48	48	Transaksi	100%	Jumlah peserta total dalam setahun
12	987361	Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.99.13	4902	9HF	005	Alokasi Fee Bank Kustodian yang disalurkan (Transaksi)	344.200.000	286.791.807	83,32%	12	12	Transaksi	100%	Jumlah peserta total dalam setahun
13	987361	Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.99.13	4902	9HF	006	Alokasi Biaya Swift atas Layanan BO Valas (Transaksi)	1.499.734.000	1.538.959.500	102,62%	12	22	Transaksi	133,33%	Jumlah peserta total dalam setahun
14	999257	Satker Pengelolaan, Pengembangan, dan Pengawasan BUN	999.99.13	6987	9HG	001	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem IT dan Infrastruktur	248.057.615.000	4.182.243.415	1,69%	1	1	Modul Aplikasi	5%	Desain Arsitektur Aplikasi SuperApps DigiT berbasis Microservices
15	999257	Satker Pengelolaan, Pengembangan, dan Pengawasan BUN	999.99.13	6987	9HG	002	Pengembangan Peraturan dan Kebijakan Pengelolaan Kas Negara	11.640.476.000	2.035.583.491	17,49%	1	1	Peraturan	17,49%	PMK Nomor 155 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Kas Pemerintah Pusat
16	999257	Satker Pengelolaan, Pengembangan, dan Pengawasan BUN	999.99.13	6987	9HG	003	Pengembangan Aplikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.655.252.000	2.935.266.532	80,30%	1	1	Aplikasi	69,80%	Pengembangan Sistem Informasi dan Basis Data PNBP berupa: 1. Penyusunan Regulasi dan Pengembangan Automatic Blocking System (ABS) 2. Pengembangan basis data Piutang PNBP
17	999257	Satker Pengelolaan, Pengembangan, dan Pengawasan BUN	999.99.13	6987	9HG	004	Pengawasan dan Monitoring Kegiatan BUN	16.554.191.000	10.661.905.772	64,41%	1	1	Rekomendasi	57,41%	Hasil pengawasan Itjen Tahun 2023: 1. Audit atas Pengawasan Ekspor CPO 2. Monitoring Dana Desa, Audit Kepatuhan atas harmonisasi Informasi Kinerja Pusat dan Daerah, Audit Kepatuhan atas Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Dana TKD 3. Pengawasan terkait Reposisi dan Penguatan Peran Kanwul DJPb dan KPPN dalam PengelolaanTransfer ke Daerah 4. Pengawasan terhadap Pemberian Dukungan Pemerintah berupa PMN pada BUMN/Lembaga Non BUMN/SMV Kementerian Keuangan 5. Pengawasan atas Optimalisasi BMN berdasarkan SBSK dan Pemanfaatan BMN pada DJKN
18	999257	Satker Pengelolaan, Pengembangan, dan Pengawasan BUN	999.99.13	6987	9HG	005	Pengembangan Kualitas SDM	80.567.698.000	19.945.818.875	24,76%	55	87	Pegawai	17,35%	Pegawai yang Memperoleh Sertifikasi
19	984438	Badan Kebijakan Fiskal	999.99.13	4094	9HA	002	Trust Fund Kepada Organisasi Internasional (OI)	226.770.124.000	225.654.456.440	99,51%	8	8	Organisasi Internasional	100%	Sampai dengan Triwulan III 2023, BKF telah membayar kontribusi kepada 8 OI
20	984515	DJKN	999.99.13	6615	9CC	100	Penyaluran Penggantian Biaya dan Margin Investasi Pemerintah (PEN)	9.595.012.000	5.487.896.908	57	57	57,2	%	100%	Penggantian biaya dan margin telah disalurkan kepada 2 BUMN dan 1 Lembaga
21	999982	Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur	999 99 13	4901	9HB	002	Alokasi Dana Dukungan Fasilitas Penyiapan Proyek KPBU (PDF)	131.565.894.000	77.736.876.111	59,09%	12	12	Proyek	100%	Target tercapai
22	978010	Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Untuk Infrastruktur Air Minum	999 99 13	4897	9HB	001	Alokasi Dana Dukungan Kelayakan Proyek KPBU (VGF)	26.851.577.000	26.851.576.322	100,00%	1	1	Proyek	100%	Target tercapai
23	999903	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	999 99 13	4939	9HC	001	Alokasi Dana Kompensasi Penugasan Dukungan Loss Limit dalam rangka PEN	1.401.380.000	1.401.380.000	100,00%	2	2	Laporan	100%	Target tercapai

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT BA BUN 2023 AUDITED
Data Pagu dan Realisasi per tanggal 31 Desember 2023

No	Satker	Nama Satker	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Belanja			Capaian RO Target'	Realisasi Volume *)	Satuan	Progress Capaian RO **)	Keterangan
								Pagu	Realisasi	%					
BA 999.01															
1	960186	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	999.01.06	4088	9AA	001	Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri	426,800,000,000,000	409,574,250,961,211	95.96%	100	100	Persen	100%	Output kegiatan Pengelolaan Pembayaran Kewajiban Utang tercapai 100% dengan rincian pinjaman dan SBN sebagaimana pada lampiran LK BA 999.01 Tahun 2023
2	960186	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	999.01.06	4088	9AA	002	Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri	14,600,000,000,000	30,575,331,536,948	209.42%	100	100	Persen	100%	
3	960186	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	999.01.06	4088	9AA	003	Pembiayaan Utang Dalam Negeri	579,835,688,666,000	542,860,028,458,620	93.62%	100	100	Persen	100%	
4	960186	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	999.01.06	4088	9AA	004	Pembiayaan Utang Luar Negeri	79,426,064,437,000	81,450,306,790,493	102.55%	100	100	Persen	100%	
BA 999.02															
1	977263	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	999.02.07	4850	9BB	002	Pembayaran Tagihan *Banking Commission*	151,000,000	101,163,777	67%	100	100	persen	100%	
2	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	015	Pemberian Hibah kepada Sekreatriat the Organization of African, Caribbean, and Pacific States - Pelatihan Information, Communication, and Technology (ICT) (Persen)	357,250,000	357,249,500	100%	100	100	Persen	100%	
3	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	016	Pemberian Hibah kepada Fiji - Preliminary Study (Persen)	3,383,489,000	3,078,343,325	91%	100	100	Persen	100%	
4	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	019	Pemberian Hibah Kepada Negara-negara anggota CARICOM dan SICA - Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurangan Dampak Risiko Bencana Serta Adaptasi Perubahan Iklim Untuk Negara Anggota Caribbean Community (CARICOM) dan Central American (Persen)	3,199,603,000	3,192,992,230	100%	100	100	Persen	100%	
5	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	020	Pemberian Hibah Kepada Negara-negara Anggota MSG - Pelatihan Tahap Lanjutan di Bidang Perikanan Pesisir untuk negara-negara Anggota MSG (Persen)	1,411,751,000	1,020,815,345	72%	100	100	Persen	100%	
6	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	027	Pemberian Hibah Kepada Ethiopia - Bantuan Penanganan Dampak Krisis Kemanusiaan Akibat Kekeringan di Ethiopia (Persen)	2,152,500,000	2,152,500,000	100%	100	100	Persen	100%	
7	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	028	Pemberian Hibah Kepada Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam - Pelatihan Information and Communication Technology for Customs Automation and Single Window (Persen)	791,206,000	690,325,009	87%	100	100	Persen	100%	
8	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	029	Pemberian Hibah Kepada Papua Nugini - Feasibility Study dan DED Port Moresby General Hospital : mortuary redevelopment dan intensive care unit (Persen)	4,753,572,000	1,489,235,859	31%	100	100	Persen	100%	
9	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	030	Pemberian Hibah kepada Papua Nugini - West Sepik Integrated Development Project (Fase I) (Persen)	5,001,632,000	5,001,631,813	100%	100	100	Persen	100%	
10	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	031	Pemberian Hibah kepada Gambia - Revitalisasi Agricultural Rural Farmers Training Center (ARFTC) di Kota Jenoi (Persen)	4,071,000,000	3,256,800,000	80%	100	100	Persen	100%	
11	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	032	Pemberian Hibah KepadaTimor Leste - Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Timor Leste melalui Program Magang di Kementerian Perdagangan (Persen)	994,373,000	994,286,723	100%	100	100	Persen	100%	
12	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	033	Pemberian Hibah Kepada Timor Leste - Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Timor Leste melalui Program Pemagangan Lintas K/L Nasional (Persen)	3,825,145,000	3,347,450,347	88%	100	100	Persen	100%	
13	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	034	Global Fund - Penanggulangan HIV, Tuberkulosis, dan Malaria di Lingkup Global (Persen)	23,445,000,000	23,445,000,000	100%	100	100	Persen	100%	
14	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	035	Pemberian Hibah Kepada Nigeria - Dukungan Vaksinasi Tahap I untuk Rakyat Nigeria (Persen)	12,732,933,000	12,732,848,383	100%	100	100	Persen	100%	
15	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	036	Pemberian Hibah kepada Nigeria - Dukungan Vaksinasi Tahap II untuk Rakyat Nigeria (Persen)	14,746,834,000	14,746,834,000	100%	100	100	Persen	100%	
16	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	037	Pemberian Hibah Kepada Gambia - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Keprotokoleran dalam rangka mendukung pelaksanaan KTT ke-15 OKI di Gambia (Persen)	1,022,351,000	814,394,346	80%	100	100	Persen	100%	
17	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	038	Pemberian Hibah Kepada Kawasan Afrika (Guinea, Senegal, Burundi, Gambia, Tanzania, Zambia, Kenya, dan Somalia) - Pelatihan Agribisnis Padi bagi Petani, Penyuluh dan Pejabat Pertanian (Persen)	3,757,522,000	1,920,137,004	51%	100	100	Persen	100%	
18	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	039	Pemberian Hibah Kepada Tanzania - Peningkatan Kapasitas SDM Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Tema "Course on Coal and Mineral Mining Safety" (Persen)	4,316,875,000	3,379,697,236	78%	100	100	Persen	100%	
19	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	040	Pemberian Hibah Kepada Tanzania - Peningkatan Kapasitas Inspektur Pertambangan Gas Bumi dengan Tema "Natural Gas Transmission and Distribution Supervision" (Persen)	3,218,567,000	2,425,566,366	75%	100	100	Persen	100%	
20	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	041	Pemberian Hibah Kepada Somalia - Dukungan Peningkatan Pelayanan Kesehatan melalui Tele-Medicine untuk di East Africa University Hospital (CoFinancing dengan Islamic Development Bank) (Persen)	8,765,640,000	8,721,160,200	99%	100	100	Persen	100%	
21	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	044	Pemberian Hibah Dukungan Pendidikan Mahasiswa Pasca Sarjana Afghanistan (Persen)	1,803,195,000	649,399,880	36%	100	100	Persen	100%	
22	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	045	Pemberian Hibah kepada Solomon - Pelatihan Budidaya Ayam Broiler (Persen)	4,439,006,000	2,407,999,231	54%	100	100	Persen	100%	
23	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	046	Pemberian Hibah kepadaKenya - Pelatihan di Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Persen)	1,300,581,000	1,066,312,720	82%	100	100	Persen	100%	
24	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	047	Pemberian Hibah kepada Namibia - Pelatihan Training of Trainer (ToT) IMO Model Course 6.09 for Instructors Institute of Marine and Fisheries (Persen)	4,020,832,000	2,663,568,419	66%	100	100	Persen	100%	
25	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	048	Pemberian Hibah kepada wilayah Asia Pasifik - Lokakarya Vessel Search for Asia/Pacific Customs Administration Officers (Persen)	2,172,994,000	1,397,049,753	64%	100	100	Persen	100%	
26	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	049	Pemberian Hibah Kepada Timor Leste - Pelatihan Teknis Klasifikasi Barang, Nilai Pabean, dan Rules of Origin Untuk Pegawai Timor-Leste Customs Authority (Persen)	1,610,280,000	1,283,286,411	80%	100	100	Persen	100%	
27	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	050	Pemberian Hibah Pelatihan eksekutif: Customs Modernization Untuk Pegawai Timor-Leste Customs Authority (Persen)	411,954,000	379,115,190	92%	100	100	Persen	100%	
28	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	051	Pemberian Hibah Timor-Leste Financial Management Reform Program: Penyiapan Standard Akuntansi Pemerintah dan Siwasta (Persen)	2,068,096,000	1,330,169,737	64%	100	100	Persen	100%	
29	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	052	Pemberian Hibah Kendaraan untuk Mendukung Operasional Sekretariat MSG (Persen)	2,139,410,000	1,625,716,508	76%	100	100	Persen	100%	
30	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	053	Pemberian Hibah Bantuan Kemanusiaan akbat kekeringan Kenya (Persen)	2,245,950,000	2,245,948,720	100%	100	100	Persen	100%	
31	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	054	Pemberian Hibah Kepada Ukraina - Pemulihan, Rekonstruksi, dan Reformasi Sektor Kesehatan bekerja sama dengan World Bank (Persen)	78,000,000,000	77,125,077,750	99%	100	100	Persen	100%	
32	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	055	Pemberian Hibah kepada Palestina - Penanganan Bencana Kemanusiaan Warga Sipil di Palestina (Persen)	31,900,000,000	30,242,392,995	95%	100	100	Persen	100%	
33	985252	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.02.07	4849	9BB	056	Pemberian Hibah kepada Myanmar - Bantuan Penanginan Dampak Krisis Kemanusiaan melalui AHA Center (Persen)	3,986,500,000	3,856,250,000	97%	100	100	Persen	100%	
BA 999.03															
1	955787	Satker Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	999.03.08	4063	9CA	009	Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Persen)	4,300,000,000,000	4,300,000,000,000	100%	100%	100%	Persen	100%	-
2	999303	Satker Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	999.03.08	4063	9CA	004	Penyaluran Dana Rehabilitasi Mangrove	800,000,000,000	800,000,000,000	100%	100%	100%	Persen	100%	-
3	961671	Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.03.08	4063	9CC	002	Rumah yang Dibiayai (Unit Rumah)	19,480,000,000,000	19,480,000,000,000	100%	220,000	229,000	Unit rumah	104%	-
4	961671	Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.03.08	5293	9CA	001	Debitur yang terfasilitasi dana bergulir lingkungan hidup (Debitur)	2,225,200,000,000	2,225,200,000,000	100%	106,663	3,257	Debitur	3%	Realisasi penerima manfaat BPDLH yang menerima fasilitas dana bergulir tahun 2023 sebanyak 3.257 debitur. Pengalihan dana reboisasi sebesar Rp2,2 T dilakukan pada bulan Desember 2023, sehingga BPDLH akan mengoptimalisasikan saldo Dana Reboisasi yang ada pada saat ini untuk penyaluran tahun 2024 dan 2025.
5	961671	Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.03.08	5295	9CA	001	Penyaluran Dana Abadi Penelitian (Persen)	5,000,000,000,000	5,000,000,000,000	100%	100%	100%	Persen	100%	-
6	961671	Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.03.08	5295	9CA	002	Penyaluran Dana Abadi Kebudayaan (Persen)	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	100%	100%	100%	Persen	100%	-
7	961671	Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.03.08	5295	9CA	003	Penyaluran Dana Abadi Perguruan Tinggi (Persen)	3,000,000,000,000	3,000,000,000,000	100%	100%	100%	Persen	100%	-
8	961671	Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.03.08	5295	9CA	008	Penyaluran Dana Abadi Pendidikan (Persen)	10,000,000,000,000	10,000,000,000,000	100%	100%	100%	Persen	100%	-
9	970974	Satker Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	999.03.08	5294	9CD	003	Jumlah Jaminan pada Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi pada Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi	18,727,251,000	18,727,251,000	100%	2	2	Surat Jaminan	100%	-
10	970974	Satker Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	999.03.08	5294	9CD	004	Jaminan pada Percepatan Pembangunan Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara	7,702,826,000	7,702,826,000	100%	5	5	Surat Jaminan	100%	-
11	970974	Satker Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	999.03.08	5294	9CD	005	Jaminan pada Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha melalui Badan Usaha Penjamin Infrastruktur	159,828,050,000	159,828,050,000	100%	7	7	Perjanjian Jaminan	100%	-

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT BA BUN 2023 AUDITED
Data Pagu dan Realisasi per tanggal 31 Desember 2023

No	Satker	Nama Satker	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Belanja			Capaian RO Target'	Realisasi Volume *)	Satuan	Progress Capaian RO **)	Keterangan
								Pagu	Realisasi	%					
12	970974	Satker Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	999.03.08	5294	9CD	006	Jaminan pada Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara	6,744,701,000	6,744,701,000	100%	10	10	Surat Jaminan	100%	-
13	970974	Satker Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	999.03.08	5294	9CD	007	Jaminan pada Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	96,767,407,000	96,767,407,000	100%	11	11	Surat Jaminan	100%	-
14	970974	Satker Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	999.03.08	5294	9CD	008	Jaminan dalam rangka Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW	6,381,270,000	6,381,270,000	100%	2	2	Jaminan	100%	-
15	977191	Satker Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	999.03.08	4098	9CB	003	Serapan Anggaran PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (Persen)	1,530,000,000,000	1,530,000,000,000	100%	100%	100%	Persen	100%	-
16	979015	Satker Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	999.03.08	4105	9CA	006	Penempatan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (Persen)	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	100%	100%	100%	Persen	100%	-
17	984125	Satker Lembaga Manajemen Aset Negara	999.03.08	4860	9CA	007	Tanah PSN yang Dibiayai (m2)	25,424,000,000,000	25,424,000,000,000	100%	58,503,426	58,503,426	m2	100%	Realisasi pengeluaran pembiayaan yang menambah saldo dana jangka panjang sebesar Rp25,424 T diatribusi oleh estimasi luasan tanah yang akan diperoleh menggunakan dana tersebut yaitu sebsar 58.503.426m2. Dana tersebut telah co-mingle dengan dana-dana tahun sebelumnya. Realisasi disbursement LMAN yang kemudian disahkan menjadi penerimaan pembiayaan sebesar Rp18.207.083.934.327 diatribusi oleh luasan tanah 35.111.731m2. Mempertimbangkan bahwa capaian Rincian Output (RO) adalah yang mengatribusi angka pengeluaran pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) maka volume capaian RO yang akan dilaporkan sebagai bagian kinerja LRA adalah sesuai yang tercantum dalam DIPA yaitu 58.503.426m2. Adapun terkait capaian perolehan luasan lahan di tahun 2023 yang mengatribusi disbursement Rp18.207.083.934.327 telah diungkapkan pada Catatan Penting Lainnya dan rinciannya diungkapkan pada lampiran laporan keuangan.
18	984393	Satker Badan Kebijakan Fiskal	999.03.08	4103	9CC	002	Tambahan Investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional (Organisasi/LKI/BUI)	1,559,634,510,000	1,559,632,528,929	100%	6	6	Organisasi/LKI/BUI	100%	-
19	986917	Satker Kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	999.03.08	4098	9CB	001	Serapan Anggaran PMN kepada PT Hutama Karya (Persero) (Persen)	28,884,000,000,000	28,884,000,000,000	100%	100%	100%	Persen	100%	-
20	986917	Satker Kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	999.03.08	4098	9CB	002	Serapan Anggaran PMN kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Persen)	10,000,000,000,000	-	0%	100%	0%	Persen	0%	PP Pencairan PMN tidak Diterbitkan
21	986917	Satker Kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	999.03.08	4098	9CB	013	Serapan Anggaran PMN kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (Persen)	2,564,710,242,000	2,564,710,241,052	100%	100%	100%	Persen	100%	-
22	986917	Satker Kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	999.03.08	4098	9CB	014	Serapan Anggaran PMN kepada PT Len Industri (Persero) (Persen)	2,210,253,223,000	2,210,253,222,285	100%	100%	100%	Persen	100%	-
23	986917	Satker Kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	999.03.08	4098	9CB	015	Serapan Anggaran PMN kepada Perum LPPNPI/Airnav Indonesia (Persen)	659,190,000,000	659,190,000,000	100%	100%	100%	Persen	100%	-
24	986917	Satker Kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	999.03.08	4098	9CB	015	Serapan Anggaran PMN kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (Persen)	3,000,000,000,000	3,000,000,000,000	100%	100%	100%	Persen	100%	-
25	986917	Satker Kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	999.03.08	4098	9CB	015	Serapan Anggaran PMN kepada PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) (Persen)	1,014,200,000,000	1,014,200,000,000	100%	100%	100%	Persen	100%	-
26	986917	Satker Kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	999.03.08	4098	9CB	015	Serapan Anggaran Investasi Non Permanen Kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	1,047,519,139,000	1,047,519,139,000	100%	100%	100%	Persen	100%	-
27	999986	Satker Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Pengelolaan Risiko Keuangan Negara)	999.03.08	5294	9CD	009	Jaminan Penugasan kepada BUMN dalam rangka Pembiayaan Infrastruktur Daerah	34,360,000,000	34,360,000,000	100%	1	1	Penjaminan	100%	-
BA 999.04															
1	977386	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.04.09	4065	9DA	001	Alokasi Penerusan Pinjaman Kepada BUMN	2,147,079,243,000	1,619,771,482,620	75.44%	7	7	Proyek	100%	
2	977386	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.04.09	4065	9DA	002	Alokasi Penerusan Pinjaman Kepada Pemda	295,220,000,000	286,227,630,138	96.95%	1	1	Proyek	100%	
BA 999.05															
DANA ALOKASI UMUM															
1	600007 s.d. 600195	Satker Penyalur Dana Transfer Umum	999.05.10	4092	9EB	004	621111 Transfer DAU tidak ditentukan penggunaannya	286,767,838,717,000	238,093,317,092,900	83.03%	545	545	Daerah	100.0%	Data Output menggunakan jumlah daerah penerima dikarenakan realisasi output DAU 2023 masih belum dapat diidentifikasi
2	600007 s.d. 600195	Satker Penyalur Dana Transfer Umum	999.05.10	4092	9EB	007	621121 Transfer DAU Penggajian Formasi PPPK	25,741,997,004,000	567,506,998,555	2.20%	545	348	Daerah	63.85%	
3	600007 s.d. 600195	Satker Penyalur Dana Transfer Umum	999.05.10	4092	9EB	008	621122 Transfer DAU Pendanaan Kelurahan	1,669,979,718,000	1,394,468,933,624	83.50%	411	399	Daerah	97.08%	
4	600007 s.d. 600195	Satker Penyalur Dana Transfer Umum	999.05.10	4092	9EB	009	621123 Transfer DAU Bidang Pendidikan	40,062,746,791,000	30,781,892,334,000	76.83%	535	535	Daerah	100%	
5	600007 s.d. 600195	Satker Penyalur Dana Transfer Umum	999.05.10	4092	9EB	010	621124 Transfer DAU Bidang Kesehatan	26,031,470,651,000	20,477,032,613,240	78.66%	534	534	Daerah	100%	
6	600007 s.d. 600195	Satker Penyalur Dana Transfer Umum	999.05.10	4092	9EB	011	621125 Transfer DAU Bidang Pekerjaan Umum	15,725,967,119,000	12,193,846,005,900	77.54%	534	534	Daerah	100%	
DANA BAGI HASIL (SDA)															
1	600007 s.d. 600195	Satker Penyalur Dana Transfer Umum	999.05.10	4068	9EB	001	6121 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi	13,057,307,573,000	13,057,307,573,000	100.00%	346	346	Daerah	100%	Data Output menggunakan jumlah daerah penerima dikarenakan realisasi output DBH 2023 masih belum dapat diidentifikasi
2	600007 s.d. 600195	Satker Penyalur Dana Transfer Umum	999.05.10	4068	9EB	001	6122 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi	7,573,702,907,000	7,573,702,907,000	100.00%	304	304	Daerah	100%	
3	600007 s.d. 600195	Satker Penyalur Dana Transfer Umum	999.05.10	4068	9EB	001	6123 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	69,998,028,214,000	69,998,028,214,000	100.00%	519	519	Daerah	100%	
4	600007 s.d. 600195	Satker Penyalur Dana Transfer Umum	999.05.10	4068	9EB	001	6124 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi	1,433,032,704,000	1,433,032,704,000	100.00%	288	288	Daerah	100%	
5	600007 s.d. 600195	Satker Penyalur Dana Transfer Umum	999.05.10	4068	9EB	001	6125 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	1,686,082,594,000	1,556,433,894,100	92.31%	522	522	Daerah	100%	
6	600007 s.d. 600195	Satker Penyalur Dana Transfer Umum	999.05.10	4068	9EB	002	6126 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	1,095,637,785,000	1,095,637,785,000	100.00%	509	509	Daerah	100%	
DANA BAGI HASIL (NON SDA)															
1	600007 s.d. 600195	Satker Penyalur Dana Transfer Umum	9990510	4068	9EB	001	611111 Transfer DBH PPh Pasal 21	28,430,567,768,000	28,430,567,768,000	100.00%	546	546	Daerah	100%	
2	600007 s.d. 600195	Satker Penyalur Dana Transfer Umum	9990510	4068	9EB	001	611112 Transfer DBH PPh Pasal 25/29	2,251,130,036,000	2,251,130,036,000	100.00%	546	546	Daerah	100%	
3	600007 s.d. 600195	Satker Penyalur Dana Transfer Umum	9990510	4068	9EB	001	611211 Transfer DBH PBB Provinsi	2,558,682,246,000	2,558,682,246,000	100.00%	38	38	Daerah	100%	
4	600007 s.d. 600195	Satker Penyalur Dana Transfer Umum	9990510	4068	9EB	001	611212 Transfer DBH PBB Kabupaten/Kota	13,419,401,480,000	13,419,401,480,000	100.00%	508	508	Daerah	100%	
5	600007 s.d. 600195	Satker Penyalur Dana Transfer Umum	9990510	4068	9EB	001	613111 Transfer DBH CHT	5,470,207,767,000	5,378,020,789,530	98.31%	427	331	Daerah	77.52%	
6	600007 s.d. 600195	Satker Penyalur Dana Transfer Umum	9990510	4068	9EB	002	612711 Transfer DBH Perkebunan Sawit	3,204,776,508,000	3,204,776,508,000	100.00%	350	350	Daerah	100%	
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK															
1	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EH		Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Broncaptering/Sumur Dalam Terlindungi	1,951,800,000,000	1,830,797,280,205	94%	496	491	SR	98.99%	
2	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EH		Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/ Broncaptering				746	745	SR	99.87%	
3	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EH		Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR)				960	946	SR	98.54%	
4	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EH		Pengadaan Mesin dan Peralatan				189	104	Paket	55.03%	
5	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EH		Pembangunan Infrastruktur Penunjang di dalam Sentra IKM	450,000,000,000	398,053,146,865	88%	11	11	Paket	100%	

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT BA BUN 2023 AUDITED
Data Pagu dan Realisasi per tanggal 31 Desember 2023

No	Satker	Nama Satker	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Belanja			Capaian RO Target	Realisasi Volume *)	Satuan	Progress Capaian RO **)	Keterangan
								Pagu	Realisasi	%					
6	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EH		Pembangunan/ Revitalisasi Sarana Produksi				59	56	Paket	94.92%	
7	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EH		Pembangunan PLTS Terpusat Offgrid	88,000,000,000	87,215,780,515	99%	11	11	MW	100%	
8	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EG		Rehabilitasi Jaringan Irigasi				106	106	Hektar	100%	
9	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EG		Peningkatan Jaringan Irigasi	1,688,944,553,000	1,507,510,515,757	89%	130	130	Hektar	100%	
10	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EG		Rehabilitasi Jaringan Irigasi				348	344	Hektar	98.85%	
11	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EF		Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi)				730	728	km	99.73%	
12	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EF		Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi)	12,617,759,056,000	12,162,540,594,920	96%	125	123	km	98.40%	
13	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EF		Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi)				185	182	km	98.38%	
14	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EG		Sarana dan Prasarana (Sarpras) Alat Ekonomi Produktif				51	23	Paket	45.10%	
15	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EG		Pembangunan Dam Penahan	32,000,000,000	29,220,059,595	91%	109	109	Unit	100%	
16	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EG		Pembangunan Gully Plug				71	71	Unit	100%	
17	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EG		Penyediaan Calon Induk Unggul dan Pakan Calon Induk				65	61	Paket	93.85%	
18	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EG		Rehabilitasi Kolam atau bak Pemijahan/induk/ calon induk/ larva/tandon	1,234,900,000,000	1,120,669,462,214	91%	65	63	Meter Persegi	96.92%	
19	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EG		Peralatan dan Mesin Menunjang Pendataan dan Penangkapan Ikan Terukur				62	54	Paket	87.10%	
20	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9ED		Pembangunan/Rehab/Kelengkapan Balai Penyuluhan KB				5605	4580	Paket	81.71%	
21	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9ED		Alat kegawatdaruratan maternal neonatal	13,400,000,000,000	12,376,619,051,710	92%	9431	3427	Paket	36.34%	
22	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9ED		Alat antropometri				5498	2781	Paket	50.58%	
23	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EG		Pengadaan unit pemantauan kualitas air secara otomatis dan online di DAS prioritas/danau prioritas/sungai tercemar berat yang mendukung penguatan DPP (bangunan dan alat)				21	10	Paket	47.62%	
24	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EG		Pengadaan Kontainer Sampah Kapasitas 6 m3	154,956,000,000	146,853,293,816	95%	47	29	Unit	61.70%	
25	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EG		Penyediaan Alat Angkut Sampah (Motor Roda 3 kapasitas 0,7 ton dan Gerobak Pilah 0,3 ton)				65	37	Paket	56.92%	
26	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EH		Fasilitas Aksesibilitas				55	52	Paket	94.55%	
27	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EH		Fasilitas Rekreasi Penunjang Kegiatan Wisata	450,000,000,000	349,057,002,092	78%	42	42	Paket	100.00%	
28	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EH		Fasilitas Umum				32	31	Paket	96.88%	
29	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EC		Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya				6235	5798	Ruang	92.99%	
30	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EC		Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	15,820,300,000,000	15,095,592,187,700	95%	2647	2482	Ruang	93.77%	
31	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EC		Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya				307	285	Ruang	92.83%	
32	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EH		Pembangunan pasar rakyat tematik wisata	150,000,000,000	149,622,533,098	100%	3	3	Unit	100%	
33	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EF		Pembangunan Jalan Usaha Tani Sektor Tanaman Pangan				183	183	Unit	100%	
34	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EG		Sarana pascapanen	2,363,652,413,000	2,174,853,051,003	92%	606	366	Paket	60.40%	
35	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081			Sarana pra panen				511	308	Paket	60.27%	
36	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EH		Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan				31	31	Meter	100%	
37	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EH		Pembangunan Baru Rumah Swadaya	160,651,813,000	137,324,360,524	85%	15	15	Unit	100%	
38	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EH		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya				17	17	Unit	100%	
39	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EH		Pembangunan tangki septik komunal (5-10 KK)				199	199	SR	100%	
40	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EH		Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK	1,569,500,000,000	1,550,016,807,373	99%	1942	1941	Unit	99.95%	
41	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EH		Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK				212	212	SR	100%	
42	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EF		Pembangunan Bus Air Roro				11	11	Unit	100%	
43	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EF		Rehabilitasi Fasilitas Sisi Darat	440,000,000,000	401,797,186,095	91%	27	25	Paket	92.59%	
44	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EF		Rehabilitasi Fasilitas Sisi Perairan				26	26	Paket	100%	
45	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EF		Pembangunan Jalan Desa Strategis				78	76	km	97.44%	
46	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EF		Peningkatan Jalan Desa Strategis	750,000,000,000	722,014,296,662	96%	57	57	km	100%	
47	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EF		Pengadaan Sarana Transportasi Darat				51	26	Unit	50.98%	
48	600007 s.d. 600195	Satker/Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EH		Fasilitasi Sarana Prasarana				177	110	Paket	62.15%	

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT BA BUN 2023 AUDITED
Data Pagu dan Realisasi per tanggal 31 Desember 2023

No	Satker	Nama Satker	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Belanja			Capaian RO Target'	Realisasi Volume *)	Satuan	Progress Capaian RO **)	Keterangan
								Pagu	Realisasi	%					
49	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EH		Pematangan Lahan	100,000,000,000	94,984,737,161	95%	3	2	Paket	66.67%	
50	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4081	9EH		Pembangunan Gedung PLUT				14	14	Paket	100%	
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK															
1	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4093	9EI	001 dan 015	Dana BOS	53,441,572,210,000	53,094,493,053,145	99.35%	43,782,293	43,764,401	Peserta Didik	99.96%	
2	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4093	9EI	002 dan 029	Dana BOP PAUD	4,119,098,130,000	4,084,456,893,769	99.16%	6,342,496	6,316,400	Peserta Didik	99.59%	
3	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4093	9EI	010 dan 030	Dana BOP Kesetaraan	1,494,568,960,000	1,476,668,917,036	98.80%	823,154	817,717	Peserta Didik	99.34%	
4	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4093	9EI	003	Dana TPG	53,337,282,097,000	27,691,026,427,700	51.92%	1,109,253	1,025,246	Guru	92.43%	
5	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4093	9EI	004	Dana Tamsil	1,309,031,712,000	682,599,026,834	52.15%	527,380	505,149	Guru	95.78%	
6	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4093	9EI	005	Dana TKG	2,005,621,483,000	825,527,078,357	41.16%	43,206	41,701	Guru	96.52%	
7	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4093	9EI	011 dan 016	Dana BOP MTB	169,975,000,000	169,975,000,000	100.00%	121	61	Museum dan Taman Budaya	50%	
8	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4093	9EI	006 dan '031	Dana BOK	12,878,672,152,000	12,412,991,969,900	96.38%	541	541	Dinas Kesehatan	12.60%	
9	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4093	9EI	007	Dana BOKB	3,239,300,000,000	3,230,739,603,000	99.74%	6239	5914	Balai Penyuluhan KB	94.79%	
10	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4093	9EI	008	Dana PK2UMK	250,000,000,000	249,210,260,000	99.68%	384	206	Peserta Pelatihan	53.65%	
11	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4093	9EI	012	Dana Kepariwisataan	133,300,000,000	131,787,586,500	98.87%	32280	17090	Peserta Pelatihan	52.94%	output s.d. tahap I 2023
12	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4093	9EI	013	Dana BLPS	65,827,750,000	62,003,157,725	94.19%	1	1	Daerah	100.00%	
13	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4093	9EI	010	Dana PPPA	132,000,000,000	128,562,300,000	97.40%	275	261	Pemerintah Daerah	94.91%	
14	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4093	9EI	020	Dana FPM	250,000,000,000	247,386,450,000	98.95%	542	170	Pelaku Usaha	31.37%	
15	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4093	9EI	021	Dana KPP	300,045,000,000	292,704,050,000	97.55%	1236	1132	Kelompok Masyarakat	91.59%	output s.d. tahap I 2023
16	600007 s.d. 600195	SatkerPenyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	4093	9EI	022	Dana PK2SIKM	200,000,000,000	192,875,000,000	96.44%	68	62	Sentra IKM	91.18%	
HIBAH KE DAERAH															
1	600006	KPPN Jakarta I Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	6947	9BA	003	Pembayaran Tagihan Hibah Jalan Daerah	293,000,000,000	274,657,782,236	93.7%	421.88	501.7	Pemeliharaan jalan daerah (km)		
2	600006	KPPN Jakarta I Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	6949	9BA	005	Pembayaran Tagihan Hibah Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang	89,906,813,000	89,906,811,006	100.0%	100	100	Pembangunan IPALD dan stasiun pompa (%)		
3	600006	KPPN Jakarta I Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	6951	9BA	009	Pembayaran Tagihan Hibah Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP - I	44,417,110,000	15,055,373,710	33.9%	92,775	31,446	Pelatihan kepada petani (petani)		
4	600006	KPPN Jakarta I Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	6952	9BA	010	Pembayaran Tagihan Hibah Mass Rapid Transit (MRT) Project	1,984,457,561,000	1,735,248,701,390	87.4%	27.75	29.42	Pembangunan jalur MRT Jakarta Fase 2A (%)		
5	600006	KPPN Jakarta I Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	6954	9BA	012	Pembayaran Tagihan Hibah Sanitasi/Air Limbah Setempat (Rupiah Murni)	150,000,000,000	118,388,860,343	78.9%	25,000	19,902	Tangki Septik pada Rumah Terlayani (RT)		
6	600006	KPPN Jakarta I Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	6956	9BA	001	Pembayaran Tagihan Hibah Bi Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (Bio CF ISFL)	31,802,922,000	27,815,501,472	87.5%	9	16.1	Penurunan emisi GRK Bersih (MtCO2e)		
7	600006	KPPN Jakarta I Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	6957	9BA	014	Pembayaran Tagihan Hibah Air Minum Berbasis Kinerja (National Urban Water Supply Project)	2,231,598,000	2,231,598,000	100.0%	2	2	Peningkatan kinerja, efisiensi operasi dan keuangan pada PDAM (PDAM)		
8	600006	KPPN Jakarta I Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	6957	9BA	015	Pembayaran Tagihan Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia	43,016,361,000	25,683,400,770	59.7%	17	16	Peningkatan kinerja tata kelola, efisiensi operasi dan keuangan, serta kualitas pelayanan pada PDAM (PDAM)		
9	600006	KPPN Jakarta I Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	6958	9BA	016	Pembayaran Tagihan Hibah Air Minum (Rupiah Murni)/Nationwide Water Hibah Program	546,065,000,000	426,438,773,182	78.1%	214,464	166,217	Sambungan Rumah (SR)		
10	600006	KPPN Jakarta I Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	6959	.9BA	017	Pembayaran Tagihan Hibah Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling up Initiative (READ-SI)	82,438,381,000	71,580,572,463	86.8%	35,675	30,976	Sekolah lapang lanjutan (Petani)		
11	600006	KPPN Jakarta I Penyalur Dana Transfer Khusus	999.05.10	6959	9BA	018	Pembayaran Tagihan Hibah The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)	200,000,000,000	153,866,685,055	76.9%	87	86	Pembangunan jalan usaha tani (km)		
DANA DESA INSENTIF OTONOMI KHUSUS (DDIOK)															
1	-	DJPK	999.05.10	5323	9EJ	001	Pengelolaan Dana Desa	70,000,000,000,000	69,856,768,617,317	99.80%	100	100	Persen	99.97%	450 Bumdes, 33.656 km jalan desa, 2.248 Polindes, 515 unit pasar desa
2	-	DJPK	999.05.10	5869	9EB	005	Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Sebelumnya yang disalurkan	3,000,000,000,000	2,054,875,766,000	68.50%	147	147	Daerah	100%	
3	-	DJPK	999.05.10	5869	9EB	012	Alokasi Insentif Fiskal Daerah Tertinggal Kinerja Tahun Sebelumnya yang disalurkan	1,000,000,000,000	591,007,582,000	59.10%	62	62	Daerah	100%	
4	-	DJPK	999.05.10	5869	9EK	006	Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan yang disalurkan	4,000,000,000,000	180,434,812,000	4.51%	338	36	Daerah	10.65%	
5	-	DJPK	999.05.10	5322	9EA	006	Alokasi Dana Keistimewaaan DIY yang disalurkan	1,420,000,000,000	1,372,725,809,224	96.67%	100	97	Persen	96.67%	
6	-	DJPK	999.05.10	4067	9EA	001	Alokasi Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum yang disalurkan	220,157,251,930	84,138,720,562	38.22%	576	491	Unit	85.33%	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni
7	-	DJPK	999.05.10	4067	9EA	002	Alokasi Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya yang disalurkan	224,481,337,500	113,902,409,650	50.74%	1967	276	Orang	14.03%	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Pendidikan Tinggi
8	-	DJPK	999.05.10	4067	9EA	003	Alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh yang disalurkan	290,733,674,773	251,073,418,423	86.36%	336	336	Dyh/Keg	100%	Terlaksananya Pembangunan Prasarana dan Penyediaan Sarana Dayah
9	-	DJPK	999.05.10	4067	9EA	004	Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur yang disalurkan	1,829,480,469,590	494,519,251,744	27.03%	11537	2031	Km	17.61%	Pembangunan Jalan
BA 999.07															
1	999701	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	999.07.11	4862	9FB	006	Subsidi IJP Pelaku Usaha Korporasi dan IJP Loss Limit Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	157,090,578,000	136,470,709,444	86.87%	2	2	Penjamin	100%	Capaian rincian output Subsidi IJP Pelaku Usaha Korporasi dan IJP Loss Limit Program PEN dan Subsidi IJP UMKM Program PEN tercapai 100% dengan rincian masing-masing 2 Penjamin yaitu, LPEI dan PT. PII (Korporasi) serta PT. Jamkrindo dan PT. Askrindo (UMKM)
2	999701	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	999.07.11	4863	9FB	001	Subsidi IJP UMKM Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	1,247,003,053,000	1,244,179,548,834	99.77%	2	2	Penjamin	100%	
3	980522	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	999.07.11	4861	9FC	002	Subsidi PPh DTP SBN Valas	5,076,940,000,000	2,707,880,270,038	53.34%	1	1	Wajibpajak	100%	Pembayaran Kurang Bayar Subsidi PPh DTP SBN Valas telah dilakukan kepada Wajib Pajak penerima manfaat
4	980522	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	999.07.11	4861	9FC	003	Subsidi PPH DTP Penghapusan Utang PDAM	129,621,000	-	0.00%	1	0	Wajibpajak	0	Tidak terdapat realisasi subsidi PPh DTP Penghapusan Piutang PDAM
5	980522	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	999.07.11	4861	9FC	001	Subsidi PPh DTP Panas Bumi	2,810,100,000,000	2,810,100,000,000	100.00%	9	9	Wajibpajak	100%	Pembayaran PPh DTP Panas Bumi telah dilakukan kepada Wajib Pajak penerima manfaat
6	956101	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	999.07.11	4862	9FA	005	Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG)	2,264,496,000	-	0.00%	988	465	Debitur	47.06%	Pembayaran subsidi resi gudang telah disalurkan kepada 465 debitur

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT BA BUN 2023 AUDITED
Data Pagu dan Realisasi per tanggal 31 Desember 2023

No	Satker	Nama Satker	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Belanja			Capaian RO Target'	Realisasi Volume *)	Satuan	Progress Capaian RO **)	Keterangan
								Pagu	Realisasi	%					
7	962718	Direktorat Jenderal Cipta Karya	999.07.11	4871	9FB	001	Subsidi Bunga Air Bersih	4,594,331,000	577,649,532	12.57%	9	8	PDAM	88.89%	Pembayaran subsidi air bersih telah disalurkan kepada 8 PDAM (1 PDAM kota Palembang tidak mengajukan taghan)
8	984149	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian	999.07.11	4865	9FA	001	Subsidi Pupuk	25,276,635,119,000	14,023,486,999,566	55.48%	6,680,286	6,040,669	Ton	90.43%	Volume pembayaran subsidi pupuk telah terealisasi sebesar 6.040.669 Ton
9	984192	Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik	999.07.11	4870	9FA	001	Subsidi PSO untuk Informasi Publik Bidang Pers	172,874,280,000	87,315,921,000	50.51%	173,000	156,830	Berita	90.65%	Volume pembayaran PSO telah terealisasi sebanyak 156.830 berita dalam bentuk artikel, podcast, photostories, infografis
10	957337	Dikretorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan	999.07.11	4868	9FA	001	Subsidi PSO Kereta Api Kelas Ekonomi Antarkota	2,395,825,599,000	1,095,339,392,291	45.72%	8,697,346	4,006,659	Penumpang	46.07%	Volume pembayaran PSO Kereta Api Kelas Ekonomi Antarkota untuk melayani sebanyak 4.006.659 penumpang
11	957337	Dikretorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan	999.07.11	4868	9FA	002	Subsidi PSO Kereta Api Kelas Ekonomi Perkotaan	2,395,825,599,000	1,095,339,392,291	45.72%	275,233,076	308,867,347	Penumpang	112.22%	Volume pembayaran PSO Kereta Api Kelas Ekonomi Perkotaan untuk melayani sebanyak 308.867.347 penumpang
12	957337	Dikretorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan	999.07.11	4868	9FA	003	Subsidi PSO Kereta Api Ringan (LRT) Jabodebek	2,395,825,599,000	1,095,339,392,291	45.72%	12,735,928	4,423,151	Penumpang	34.73%	Volume pembayaran PSO Kereta Api LRT Jabodebek untuk melayani sebanyak 4.423.151 penumpang
13	985120	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan	999.07.11	4869	9FA	001	Subsidi PSO Angkutan Laut Kelas Ekonomi	2,395,825,599,000	1,095,339,392,291	45.72%	4,563,277	4,264,748	Penumpang	93.46%	Volume pembayaran PSO Angkutan Laut Kelas Ekonomi untuk melayani sebanyak 4.264.748 penumpang
14	987252	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	999.07.11	4873	9FB	001	Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	895,000,000,000	616,922,000,000	68.93%	220,000	220,000	Unit	100.00%	Volume penyaluran subsidi bantuan uang muka perumahan sebanyak 220.000 unit
15	987252	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	999.07.11	4873	9FB	002	Subsidi Bunga Kredit Perumahan	3,457,520,000,000	2,673,243,550,690	77.32%	754,004	750,497	Unit	99.53%	Volume penyaluran subsidi bunga kredit perumahan sebanyak 750.497 unit
16	984620	Deputi Bidang Usaha Mikro	999.07.11	4863	9FB	002	Subsidi UP KUR	3,457,520,000,000	2,673,243,550,690	77.32%	2	2	Penjamin	100%	Telah dilakukan pembayaran tagihan kepada 2 (dua) penjamin yaitu Askrindo dan Jamkrindo untuk Penjaminan KUR
17	984620	Deputi Bidang Usaha Mikro	999.07.11	4863	9FB	004	Subsidi Bunga KUR	3,457,520,000,000	2,673,243,550,690	77.32%	4,761,092	4,438,471	Debitur	93.22%	Dengan target debitur sebesar 4.761.092, telah disalurkan subsidi kepada 4.438.471 debitur
18	979321	Direktorat Jenderal Anggaran	999.07.11	4867	9FD	001	Subsidi Listrik	72,576,858,846,000	42,736,312,937,767	58.88%	637	620	TWH	97.33%	Telah disalurkan subsidi listrik dengan volume sebanyak 620 Tera Watt/hour
19	979321	Direktorat Jenderal Anggaran	999.07.11	4867	9FD	002	Subsidi Minyak Solar	17,000,000,000,000	11,114,380,888,856	65.38%	17,000,000	16,056,418	Kilo Liter	94.45%	Telah disalurkan subsidi solar dengan volume sebanyak 16 juta Kilo Liter
20	979321	Direktorat Jenderal Anggaran	999.07.11	4867	9FD	003	Subsidi Minyak Tanah	4,549,879,769,000	2,752,786,331,666	60.50%	500,000	448,109	Kilo Liter	89.62%	Telah disalurkan subsidi minyak tanah dengan volume sebanyak 5,3 ribu Kilo Liter
21	979321	Direktorat Jenderal Anggaran	999.07.11	4867	9FD	004	Subsidi LPG Tabung 3 Kg	117,849,387,429,000	46,457,915,948,234	39.42%	8,000,000	7,726,743	Metrik Ton	96.58%	Telah disalurkan subsidi minyak tanah dengan volume sebanyak 7,7 juta Metrik Ton
22	983783	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.07.11	4862	9FB	004	004 Subsidi Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)	41,205,000	41,204,433	100.00%	15	15	Debitur	100%	Realisasi pembayaran tunggakan 100% kepada 15 Debitur KUPS
23	983783	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.07.11	4862	9FB	008	Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	41,272,222,000	853,768,416	2.07%	2	1	Debitur	50.00%	Dari dua akad perjanjian dengan Perum BULOG, hanya satu akad kredit yang dicairkan, sehingga subsidi bunga pinjaman utk CPP hanya terealisasi 50%
24	999704	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.07.11	6454	9FB	001	Subsidi Bunga Pinjaman Daerah (PEN)	172,022,821,000	160,320,970,852	93.20%	31	29	Pemerintah Daerah	93.55%	Telah disalurkan subsidi bunga pinjaman daerah untuk 29 Pemda
BA 999.08															
1	962450	Istana Kepresidenan Jakarta	999.08.12	4096	9GA	001	Bantuan Kemasyarakatan Presiden	156,527,736,000	135,998,260,308	87%	1	1.00	Layanan	1	Realisasi untuk Banmas dilaksanakan berdasarkan perintah Presiden baik secara lisan maupun tertulis. Realisasi ini dapat dilaksanakan pada saat Kunker Presiden dan berdasarkan permohonan tertulis dalam bentuk proposal, surat, atau dokumen permintaan Banmas lain yang sejenis atau tanpa adanya permohonan. kegiatan meliputi kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, kesehragaan dan kegiatan lainnya.
2	999465	Sekretariat Wakil Presiden RI	999.08.12	4096	9GA	002	Bantuan Kemasyarakatan Wakil Presiden	31,503,248,000	31,408,183,486	100%	1	1.00	Layanan	1	Realisasi kegiatan Banmas Wapres telah mencapai 100% pada Desember 2023
3	984423	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	999.08.12	4886	9GA	001	Layanan Dukungan Manajemen Pengelolaan Kawasan Bintan dan Karimun	7,446,788,000	5,532,272,156	74%	1	1.00	Layanan	1	- Sewa Menyewa Kendaraan Operasional Pejabat/Pegawai, Sewa Gedung - Honorarium Kegiatan - Pemeliharaan PM (Komputer, AC dan lainnya) - Laporan Keuangan Per Semester, Triwulan, Tahunan - Pendidikan dan Pelatihan Teknis - Penyusunan Anggaran - Pengadaan Sarana dan Prasarana - Laporan Renstra
4	984423	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	999.08.12	4886	9GA	002	Pengusahaan Kawasan Sekretariat Dewan Kawasan PBPB Bintan dan Karimun	3,030,780,000	2,470,227,853	82%	1	1.00	Layanan	1	- Koordinasi dan Fasilitas Pengembangan Investasi di Kawasan PBPB Bintan dan Karimun - Promosi Publikasi
5	984423	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	999.08.12	4886	9GA	003	Layanan Dukungan Manajemen BP Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan	7,854,209,000	6,488,587,799	83%	1	0.92	Layanan	1	- Sewa Menyewa Kendaraan Operasional Pejabat/Pegawai, Sewa Gedung - Honorarium Kegiatan - Pemeliharaan PM (Komputer, AC dan lainnya) - Pengadaan Pakaian Kerja PPNPN - Pengadaan Peralatan Kantor - Sosialisasi Kegiatan Penanaman Modal
6	984423	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	999.08.12	4886	9GA	004	Pengusahaan Kawasan BP Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan	85,376,746,000	84,100,546,070	99%	1	1.00	Layanan	1	- 15 Pekerjaan Perencanaan Jalan dan PJU - 1 Pekerjaan Identifikasi Lahan - 11 Pekerjaan Peningkatan dan/atau Pembangunan Jalan dan PJU - 9 Pekerjaan Pengawasan Peningkatan dan/atau Pembangunan dan dan PJU - Promosi dalam dan Luar Negeri
7	984423	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	999.08.12	4886	9GA	005	Layanan Dukungan Manajemen BP Kawasam Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang	4,857,212,000	4,235,056,045	87%	1	1.00	Layanan	1	- Sewa Menyewa Kendaraan Operasional Pejabat/Pegawai, Sewa Gedung - Honorarium Kegiatan - Pemeliharaan PM (Komputer, AC dan lainnya) - Koordinasi terkait perkembangan Pelabuhan Tg. Mocco - Sosialisasi Kebijakan Perizinan dan Investasi - Peyediaan Sarana Prasarana Kantor
8	984423	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	999.08.12	4886	9GA	006	Pengusahaan Kawasan BP Kawasan Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang	63,889,507,000	63,040,542,982	99%	1	1.00	Layanan	1	- Promosi Dagang Dalam dan Luar Negeri - 8 Pekerjaan Perencanaan Teknis Pemeliharaan, Pembangunan dan/Atau Peningkatan Jalan dan PJU - 7 Pekerjaan Pengawasan Jalan dan PJU - 7 Pekerjaan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan untuk Jalan dan PJU - Dokumen Rencana Rinci Kawasan-Kawasan PBPB Bintan Wilko Tanjungpinang - Pemeliharaan Tanaman
9	984423	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	999.08.12	4886	9GA	007	Layanan Dukungan Manajemen BP Kawasan Karimun	8,495,530,000	6,741,729,459	79%	1	1.00	Layanan	1	- Sewa Menyewa Kendaraan Operasional Pejabat/Pegawai, Sewa Gedung - Honorarium Kegiatan - Pemeliharaan PM (Komputer, AC dan lainnya) - Pakaian Kerja PPNPN (Supir, Pramubakti, Satpam, Petugas Kebersihan) - Pengadaan Sarana dan Prasarana - Monev dan Sosialisai Kegiatan Penanaman Modal
10	984423	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	999.08.12	4886	9GA	008	Pengusahaan Kawasan BP Kawasan Karimun	65,491,851,000	63,993,659,568	98%	1	1.00	Layanan	1	- 5 Pekerjaan Peningkatan Jalan beserta Pengawasannya - Perencanaan dan Pengawasan Pemeliharaan Taman dan Jalan - Pembangunan Gazebo

RINCIAN CAPAIAN OUTPUT BA BUN 2023 AUDITED
Data Pagu dan Realisasi per tanggal 31 Desember 2023

No	Satker	Nama Satker	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Belanja			Capaian RO Target'	Realisasi Volume *)	Satuan	Progress Capaian RO **)	Keterangan
								Pagu	Realisasi	%					
11	984526	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika KOMINFO	999.08.12	4893	9GA	001	Layanan Pos Universal	378,269,521,000	366,120,584,924	97%	2460	2460.00	KPC LPU	1	- Gaji pegawai sebanyak 2.920 kantor LPU - Sewa kantor sebanyak 904 kantor LPU, sewa kendaraan roda dua sebanyak 103 sepeda motor, dan Mitra LPU sebanyak 1.322 Mitra - biaya pemeliharaan 293 kantor LPU, kebersihan pada 2.460 kantor LPU - biaya listrik, telepon dan air pada 2.460 kantor LPU
12	999255	Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja	999.08.12	4967	9GA	002	Pelatihan Program Kartu Prakerja	4,200,000,000,000	2,609,685,763,700	62%	1151833	1151833.00	Peserta	1	MPPKP telah menetapkan Selama Tahun anggaran 2023 sebanyak : 1.272.177 Peserta dan mencabut peserta sebanyak : 120.344
13	999255	Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja	999.08.12	4967	9GA	003	Layanan Dukungan Manajemen Program Kartu Prakerja	171,000,000,000	152,308,358,281	89%	1	1.00	Layanan	1	
14	999292	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua	999.08.12	4887	9GA	001	Ongkos angkut beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua	145,036,314,000	115,898,315,312	80%	25	25.00	Kabupaten	1	Volume Kontrak 15.304.310 kg, SO Bulog yang diterima 15.213.390 kg dan Beras yang telah didistribusikan 15.213.390 kg
15	999510	Direktorat Jenderal Anggaran	999.08.12	4966	9GA	001	Penyelesaian Utang Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran BBM	133,123,621,611,000	133,123,621,605,637	100%	1	1.00	Laporan	1	Telah diproses penyelesaian Penyelesaian Utang Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran BBM dan Tarif Tenaga Listrik
16	999510	Direktorat Jenderal Anggaran	999.08.12	4967	9GA	002	Penyelesaian Utang Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Tarif Tenaga Listrik	72,949,871,533,000	72,949,871,530,177	100%	1	1.00	Laporan	1	Telah diproses penyelesaian Penyelesaian Utang Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran BBM dan Tarif Tenaga Listrik
17	999975	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi	999.08.12	4892	9GA	001	Layanan Dukungan Manajemen Pengawasan dan Pengembangan Industri Hulu Migas	1,452,983,773,000	1,446,516,429,750	99.55%	1	1.00	Layanan	100%	Rincian Capaian KPI SKK Migas antara lain: - Reserves Replacement Ratio 123,50% dari target 100% - Lifting Minyak & Kondensat 605,5 ribu dari target 660 ribu; Lifting Gas 960,4 ribu dari target 1.100 - Pengendalian Cost Recovery 7,67 Miliar dari target 8,25 Miliar - Penerimaan Negara14,59 Miliar dari target 15,88 Miliar - Penyelesaian Kegiatan Proyek Strategi Nasional: Proyek UCC BP Tangguh, Tangguh Train-3, Abadi, IDD - Proyek Onstream - Proyek Strategis Hulu Migas
18	999975	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi	999.08.12	4893	9GA	002	Layanan Industri Hulu Migas	266,676,620,000	256,269,164,943	96.10%	4	4.00	Layanan	100%	
19	999976	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat	999.08.12	4888	9GA	001	Ongkos angkut beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat	17,418,606,000	16,792,674,340	96%	12	12.00	Kabupaten	1	Volume Kontrak 7.472.042 kg, SO Bulog yang diterima 7.007.830 kg dan Beras yang telah didistribusikan 7.007.830 kg
20	999801	Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan	999.08.12	4109	9GA	002	Cadangan Pangan Pemerintah	12,875,144,609,000	12,875,144,605,421	100%	2987091331	2987091331.00	Kilogram	1	Jumlah beras yang disalurkan sebanyak 2.987.091.331 kg berdasarkan hasil reviu dari BPK/BPKP/APIP
BA 999.99															
1	987361	Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.99.13	4899	9HD	001	Manfaat Pensiun dan Cicilan UPSL Program THT yang disalurkan (Peserta)	140,518,156,055,000	140,460,140,757,039	99.96%	3,657,276	4,043,989	Peserta	110.57%	Jumlah rata-rata peserta dalam setahun
2	987361	Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.99.13	4899	9HD	002	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja yang disalurkan (Peserta)	294,187,729,000	294,187,728,596	100.00%	12,268,509	11,061,076	Peserta	90.16%	Jumlah rata-rata peserta dalam setahun
3	987361	Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.99.13	4899	9HD	003	Iuran Asuransi Kesehatan yang disalurkan (Peserta)	10,031,079,512,000	10,031,079,509,664	100.00%	4,085,180	4,333,652	Peserta	106.08%	Jumlah rata-rata peserta dalam setahun
4	987361	Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.99.13	4899	9HD	004	Iuran Jamkesmen dan Jamkestama yang disalurkan (Peserta)	283,280,824,000	280,506,819,628	99.02%	7,073	6,431	Peserta	90.92%	Jumlah rata-rata peserta dalam setahun
5	987361	Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.99.13	4899	9HD	005	Iuran Jaminan Kematian Kerja yang disalurkan (Peserta)	535,249,696,000	535,249,695,404	100.00%	12,268,509	11,061,076	Peserta	90.16%	Jumlah rata-rata peserta dalam setahun
6	987361	Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.99.13	4899	9HD	007	Biaya Operasional Penyelenggaraan yang disalurkan (Peserta)	801,660,591,000	709,040,117,878	88.45%	3,605,796	3,962,896	Peserta	109.90%	Jumlah rata-rata peserta dalam setahun
7	987361	Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.99.13	4900	9HE	001	Alokasi Selisih Harga Beras Bulog yang disalurkan	121,245,800,000	121,245,799,637	100.00%	34,888,346	34,888,346	Kg	100%	Jumlah peserta total dalam setahun
8	987361	Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.99.13	4902	9HF	001	Alokasi PPN BI RTGS/SWIFT yang disalurkan (Transaksi)	67,097,000	-	0.00%	17,329	-	Transaksi	0.00%	
9	987361	Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.99.13	4902	9HF	002	Alokasi Bunga Negatif yang disalurkan (Transaksi)	36,000,000	24,323,189	67.56%	12	12	Transaksi	100%	Jumlah peserta total dalam setahun
10	987361	Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.99.13	4902	9HF	003	Alokasi Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi/Lainnya yang disalurkan (Transaksi)	360,288,120,000	302,033,767,000	83.83%	127,701,732	104,574,018	Transaksi	81.89%	Jumlah peserta total dalam setahun
11	987361	Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.99.13	4902	9HF	004	Alokasi PPN Atas Transaksi RTGS BO yang disalurkan (Transaksi)	221,512,000	143,238,480	64.66%	48	48	Transaksi	100%	Jumlah peserta total dalam setahun
12	987361	Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.99.13	4902	9HF	005	Alokasi Fee Bank Kustodian yang disalurkan (Transaksi)	344,200,000	286,791,807	83.32%	12	12	Transaksi	100%	Jumlah peserta total dalam setahun
13	987361	Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan	999.99.13	4902	9HF	006	Alokasi Biaya Swift atas Layanan BO Valas (Transaksi)	1,499,734,000	1,538,959,500	102.62%	12	22	Transaksi	133.33%	Jumlah peserta total dalam setahun
14	999257	Satker Pengelolaan, Pengembangan, dan Pengawasan BUN	999.99.13	6987	9HG	001	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem IT dan Infrastruktur	248,057,615,000	4,182,243,415	1.69%	1	1	Modul Aplikasi	5%	Desain Arsitektur Aplikasi SuperApps DigiT berbasis Microservices
15	999257	Satker Pengelolaan, Pengembangan, dan Pengawasan BUN	999.99.13	6987	9HG	002	Pengembangan Peraturan dan Kebijakan Pengelolaan Kas Negara	11,640,476,000	2,035,583,491	17.49%	1	1	Peraturan	17.49%	PMK Nomor 155 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Kas Pemerintah Pusat
16	999257	Satker Pengelolaan, Pengembangan, dan Pengawasan BUN	999.99.13	6987	9HG	003	Pengembangan Aplikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	3,655,252,000	2,935,266,532	80.30%	1	1	Aplikasi	69.80%	Pengembangan Sistem Informasi dan Basis Data PNBP berupa: 1. Penyusunan Regulasi dan Pengembangan Automatic Blocking System (ABS) 2. Pengembangan basis data Piutang PNBP
17	999257	Satker Pengelolaan, Pengembangan, dan Pengawasan BUN	999.99.13	6987	9HG	004	Pengawasan dan Monitoring Kegiatan BUN	16,554,191,000	10,661,905,772	64.41%	1	1	Rekomendasi	57.41%	Hasil pengawasan Itjen Tahun 2023: 1. Audit atas Pengawasan Ekspor CPO 2. Monitoring Dana Desa, Audit Kepatuhan atas harmonisasi Informasi Kinerja Pusat dan Daerah, Audit Kepatuhan atas Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Dana TKD 3. Pengawasan terkait Reposisi dan Penguatan Peran Kanwul DJPb dan KPPN dalam PengelolaanTransfer ke Daerah 4. Pengawasan terhadap Pemberian Dukungan Pemerintah berupa PMN pada BUMN/Lembaga Non BUMN/SMV Kementerian Keuangan 5. Pengawasan atas Optimalisasi BMN berdasarkan SBSK dan Pemanfaatan BMN pada DJKN
18	999257	Satker Pengelolaan, Pengembangan, dan Pengawasan BUN	999.99.13	6987	9HG	005	Pengembangan Kualitas SDM	80,567,698,000	19,945,818,875	24.76%	55	87	Pegawai	17.35%	Pegawai yang Memperoleh Sertifikasi
19	984438	Badan Kebijakan Fiskal	999.99.13	4094	9HA	002	Trust Fund Kepada Organisasi Internasional (OI)	226,770,124,000	225,654,456,440	99.51%	8	8	Organisasi Internasional	100%	Sampai dengan Triwulan III 2023, BKF telah membayar kontribusi kepada 8 OI
20	984515	DJKN	999.99.13	6615	9CC	100	Penyaluran Penggantian Biaya dan Margin Investasi Pemerintah (PEN)	9,595,012,000	5,487,896,908	57	57	57.2	%	100%	Penggantian biaya dan margin telah disalurkan kepada 2 BUMN dan 1 Lembaga
21	999982	Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur	999 99 13	4901	9HB	002	Alokasi Dana Dukungan Fasilitas Penyiapan Proyek KPBU (PDF)	131,565,894,000	77,736,876,111	59.09%	12	12	Proyek	100%	Target tercapai
22	978010	Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Untuk Infrastruktur Air Minum	999 99 13	4897	9HB	001	Alokasi Dana Dukungan Kelayakan Proyek KPBU (VGF)	26,851,577,000	26,851,576,322	100.00%	1	1	Proyek	100%	Target tercapai
23	999903	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	999 99 13	4939	9HC	001	Alokasi Dana Kompensasi Penugasan Dukungan Loss Limit dalam rangka PEN	1,401,380,000	1,401,380,000	100.00%	2	2	Laporan	100%	Target tercapai

Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum Dalam Rupiah Tahun 2023

Nama Rekening	Saldo 31 Desember 2023 (Rupiah)	Saldo 31 Desember 2022 (Rupiah)	Kenaikan (Penurunan)	Saldo Rekening Koran 31 Desember 2023	Selisih antara Saldo 31 Desember 2023 dengan Rekening Koran	Keterangan
Rekening Kas Umum Negara Dalam Rupiah	3.397.837.721.385	3.147.161.809.214	250.675.912.171	3.308.195.179.901	89.642.541.484	Kesalahan pemindahbukuan antara RKUN, RPATA, dan RDC: 1. Kesalahan pemindahbukuan RPATA Neto Rp69.642.541.396 2. Kesalahan pemindahbukuan RDCA Mabes TNI AU Rp20.000.000.000 3. Pembulatan sebesar Rp88
Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH	2.711.147.196.694	2.412.732.511.396	298.414.685.298	2.711.147.196.694	-	-
Rekening Lain BI Saldo Anggaran Lebih	121.859.042.325.583	184.317.792.809.485	(62.458.750.483.902)	121.859.042.325.583	-	-
Rekening Kas Penempatan Dalam Rupiah	6.336.895.305.865	34.293.585.351.085	(27.956.690.045.220)	35.019.082.636.819	(28.682.187.330.954)	SP2D Reject pada akhir 2023 atas Belanja DBH Non Tunai (TDF), Belanja DBH Tunai, dan Belanja Pihak Ketiga dengan rincian sbb: 1. SP2D DBH Non Tunai (TDF) sebesar Rp27.559.024.870.450,00 2. SP2D DBH Tunai 1.122.855.272.000,00 3. SP2D Belanja Pihak ke Tiga 307.188.473,00 4. Pembulatan sebesar Rp31
*) Rekening Khusus dalam Rupiah	4.698.022.677.397	5.439.463.860.693	(741.441.183.296)	4.698.022.677.388	9	Pembulatan angka pada rekening koran
Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat-Gaji	8.602.239.471.956	8.495.421.788.199	106.817.683.757	8.602.239.471.956	-	-
Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat-NonGaji	1.182.832.010.487	-	1.182.832.010.487	25.027.817.240.493	(23.844.985.230.006)	SP2D Reject pada akhir 2023 atas Belanja DBH Non Tunai (TDF), Belanja DBH Tunai, dan Belanja Pihak Ketiga dengan rincian sbb: 1. SP2D DBH Non Tunai (TDF) sebesar Rp23.388.668.849.000 2. SP2D DBH Tunai Rp37.487.788.000 3. SP2D Belanja Pihak ke Tiga Rp49.455.716.006 4. Kesalahan Perbankan BNI Rp369.372.877.000
Rekening SubRKUN Kuasa BUN Pusat (Kas di Rekening Investasi Pemerintah BUN)	807.354.110.895	289.597.970.365	517.756.140.530	807.354.110.895	-	-
Total	**149.595.370.820.262**	**238.395.756.100.437**	**(88.800.385.280.175)**	**202.032.900.839.729**	**(52.437.530.019.467)**	

Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum Dalam Valuta Asing Tahun 2023

Nama Rekening	Saldo 31 Desember 2023 (Rupiah)	Saldo 31 Desember 2022 (Rupiah)	Kenaikan (Penurunan)
Rekening KUN dalam Valuta USD	756.926.477.074	322.082.536.666	434.843.940.408
Rekening KUN Dalam Valuta Yen	6.099.000.486.364	27.267.669.242	6.071.732.817.122
Rekening KUN dalam Valuta Euro	15.262.144.761	22.082.827.222.971	(22.067.565.078.210)
Rekening Kas Penempatan Dalam USD	39.874.716.757.070	130.892.668.710.781	(91.017.951.953.711)
Rekening Kas Penempatan Dalam Euro	15.255.402.886.248	-	15.255.402.886.248
Kas di Rekening SAL dalam Valuta USD	129.927.177.044.667	-	129.927.177.044.667
Rekening Khusus dalam Valas	1.311.842.424.130	2.375.859.331.346	(1.064.016.907.216)
Total	**193.240.328.220.314**	**155.700.705.471.006**	**37.539.622.749.308**

Rekening Pemerintah Lainnya Tahun 2023

Nama Rekening	Saldo 31 Desember 2023 (Rupiah)	Saldo 31 Desember 2022 (Rupiah)
Rekening Penerimaan Dana Investasi	(10)	1
Rekening Penerimaan Dana Pembangunan Daerah	27	27
*)Rekening Penerimaan Migas	1.466.441.303.733	3.615.314.582.701
**)Rekening Penerimaan Panas Bumi	1.912.870.273.103	1.588.329.504.774
Kas di Rekening Dana Bergulir	40.878.955	9.548.799
Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Non Gaji	127.419.028.658	245.275.438.525
Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji		-
Kas di Rekening Retur Surat Berharga Syariah Negara	975.196.065	2.688.233.023
Pembulatan		
Total	**3.507.746.680.531**	**5.451.617.307.850**

*)nilai rekening koran adalah sebesar Rp1.466.441.308.056 sehingga terdapat selisih dengan rekening koran sebesar Rp4.323 dikarenakan adanya perbedaan pembulatan mata uang asing pada SPAN dan Rekening Koran

**)nilai rekening koran adalah sebesar Rp1.912.870.273.099 sehingga terdapat selisih dengan rekening koran sebesar (Rp4) dikarenakan adanya perbedaan pembulatan mata uang asing pada SPAN dan Rekening Koran

RINCIAN KAS DI REKENING KAS DI KPPN TAHUN 2023

Kode KPPN	KPPN	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
140	KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	90.199.720,00	(90.199.720)	-
901	KHUSUS PENERIMAAN	2.774.907.142.727	2.353.880.282.028	5.128.787.424.755
	Total	**2.774.997.342.447**	**2.353.790.082.308**	**5.128.787.424.755**

RINCIAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN TAHUN 2023

Kode KPPN	KPPN	TA 2023		
		NERACA LAJUR		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
001	BANDA ACEH	1.684.006.256	(1.513.364.093)	170.642.163
003	MEULABOH	-	1.000.000	1.000.000
005	PEMATANG SIANTAR	-	141.280.000	141.280.000
006	PADANG SIDEMPUAN	5.029.000	(5.029.000)	-
007	GUNUNG SITOLI	-	24.000.000	24.000.000
008	PEKANBARU	24.039.000	1.425.933	25.464.933
010	PADANG	127.163.010	(43.312.827)	83.850.183
011	BUKITTINGGI	91.234.370	(78.354.370)	12.880.000
012	JAMBI	1.125.000	47.423.000	48.548.000
014	PALEMBANG	459.474.470	196.987.798	656.462.268
015	PANGKAL PINANG	146.978.128	(146.978.128)	-
017	BANDAR LAMPUNG	568.293.735	(560.926.735)	7.367.000
018	JAKARTA I	162.030.435.506	(15.047.027.025)	146.983.408.481
019	JAKARTA II	1.170.100.624	251.146.104	1.421.246.728
020	SERANG	23.056.964	148.434.744	171.491.708
022	BANDUNG I	-	845.823.281	845.823.281
023	BOGOR	101.179.759	(3.179.759)	98.000.000
024	CIREBON	41.000.000	(40.400.000)	600.000
025	TASIKMALAYA	-	19.386.000	19.386.000
026	SEMARANG I	30.976.000	(30.976.000)	-
028	SURAKARTA	15.822.500	(15.822.500)	-
029	PURWOKERTO	6.329.000	(6.329.000)	-
030	YOGYAKARTA	311.211.661	(311.211.661)	-
031	SURABAYA I	39.291.000	(4.539.916)	34.751.084
033	MADIUN	61.356.570	(61.356.570)	-
037	DENPASAR	8.448.106	197.151.894	205.600.000
039	KUPANG	549.636.748	190.814.316	740.451.064
042	PONTIANAK	157.437.935	81.415.974	238.853.909
043	PALANGKARAYA	204.036.203	(147.243.202)	56.793.001
045	BANJARMASIN	29.511.000	68.998.135	98.509.135
046	SAMARINDA	-	419.063.697	419.063.697
047	BALIKPAPAN	58.717.000	29.393.898	88.110.898
049	MANADO	1.654.941.884	(1.575.608.533)	79.333.351
050	GORONTALO	16.600.000	89.624.464	106.224.464
051	PALU	15.035.802	112.139.198	127.175.000
052	POSO	9.632.700	(632.700)	9.000.000
057	PARE PARE	387.000	2.076.054	2.463.054
059	MAJENE	2.835.000	(2.835.000)	-
060	KENDARI	29.941.350	11.349.050	41.290.400
061	AMBON	379.875.353	1.681.986.647	2.061.862.000
062	TERNATE	45.690.000	(7.138.000)	38.552.000
063	JAYAPURA	1.578.841.491	258.055.999	1.836.897.490
064	BIAK	24.651.950	(24.651.950)	-
065	MANOKWARI	1.015.878.463	2.675.234.435	3.691.112.898
066	SORONG	9.996.500	(9.996.500)	-
067	FAK FAK	21.603.000	(3.603.000)	18.000.000
068	MERAUKE	-	1.670.559.593	1.670.559.593
072	PEKALONGAN	3.256.000	(3.256.000)	-
076	TANJUNG BALAI ASAHAN	-	4.900.000	4.900.000
077	SIJUNJUNG	16.212.000	(16.212.000)	-
078	MUARA BUNGO	-	14.471.000	14.471.000
079	SINTANG	-	21.530.900	21.530.900
080	BUNTOK	1.422.000	(1.422.000)	-
081	KOTABARU	-	3.874.900	3.874.900
082	TOLI TOLI	22.149.000	(19.474.000)	2.675.000
083	TAHUNA	1.890.350	13.109.650	15.000.000
084	TUAL	-	15.121.000	15.121.000
088	JAKARTA III	23.760.305.985	(17.331.928.713)	6.428.377.272

Kode KPPN	KPPN	TA 2023		
		NERACA LAJUR		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
090	SOLOK	27.231.000	(27.231.000)	-
091	LUBUK SIKAPING	103.880.000	(103.880.000)	-
092	RENGAT	16.070.835	(16.070.835)	-
095	BANDUNG II	1.572.087.900	(1.529.970.530)	42.117.370
096	GARUT	16.940.000	(16.940.000)	-
097	PATI	-	763.322.450	763.322.450
100	BANYUWANGI	-	16.497	16.497
102	PANGKALAN BUN	2.020.000	(2.020.000)	-
103	BAU BAU	3.475.000	(3.475.000)	-
104	SAUMLAKI	20.159.091	(20.159.091)	-
107	TANJUNG PANDAN	-	43.592.200	43.592.200
109	BATURAJA	66.501.500	(66.501.500)	-
111	RUTENG	297.681.168	(297.681.168)	-
112	TOBELO	16.570.000	(370.000)	16.200.000
113	WAMENA	5.481.000	788.459.218	793.940.218
118	TEGAL	55.505.474	(55.505.474)	-
120	DUMAI	11.141.000	(11.141.000)	-
121	MANNA	57.749.000	(57.749.000)	-
123	MEDAN II	185.985.000	(145.963.000)	40.022.000
124	TEBING TINGGI	-	1.152.000	1.152.000
133	JAKARTA IV	1.216.215.169	1.282.902.716	2.499.117.885
135	SURABAYA II	-	2.363.000	2.363.000
136	MAKASSAR II	59.904.470	(59.904.470)	-
138	SERUI	-	4.712.500	4.712.500
139	JAKARTA V	5.731.017.784	(399.722.233)	5.331.295.551
140	KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	-	2.786.620	2.786.620
143	KUALA TUNGKAL	6.110.000	(6.110.000)	-
146	CURUP	-	228.512	228.512
148	KLATEN	4.081.000	4.434.000	8.515.000
149	WONOSARI	10.000.000	(10.000.000)	-
151	TANJUNG	61.894.000	(61.894.000)	-
153	TANJUNG REDEP	-	70.477.363	70.477.363
157	RAHA	-	2.333.468	2.333.468
158	KOTAMOBAGU	54.660.000	(54.660.000)	-
159	BANGKO	-	5.000.000	5.000.000
161	RANGKASBITUNG	-	9.725.000	9.725.000
165	SIDOARJO	695.501	(695.501)	-
170	MAKALE	-	5.056.000	5.056.000
171	BEKASI	28.652.000	(28.652.000)	-
173	MASOHI	550.000	1.734.568.107	1.735.118.107
175	JAKARTA VI	7.898.852.038	6.119.702.786	14.018.554.824
178	MAMUJU	44.432.000	1.058.251.368	1.102.683.368
179	BITUNG	-	30.770.000	30.770.000
182	JAKARTA VII	1.794.575.059	533.244.428	2.327.819.487
185	TANJUNG SELOR	-	71.935.519	71.935.519
		215.927.152.362	**(18.216.293.568)**	**197.710.858.794**

RINCIAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN PER K/L TAHUN 2023

Nama BA	Tahun 2023		
	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	1	(1)	-
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	-	240.250	240.250
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	-	24.120.000	24.120.000
BADAN NARKOTIKA NASIONAL	-	83.656.568	83.656.568
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	3.306.627.482	(3.306.627.482)	-
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)	-	439.981.345	439.981.345
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	450	(450)	-
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	47.288.726	(47.288.726)	-
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	2.311.053.522	14.824.786.642	17.135.840.164
BADAN PUSAT STATISTIK	89.371.020	(89.371.020)	-
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	1	23.976.751	23.976.752
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	200	(200)	-
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	1.189.024.560	(379.335.315)	809.689.245
KEMENTERIAN AGAMA	1.879.354.064	77.768.231	1.957.122.295
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	250.293.807	(201.730.717)	48.563.090
KEMENTERIAN DALAM NEGERI	6.878.962	49.830.158	56.709.120
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	23.500.000	(5.500.000)	18.000.000
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	791.843.042	791.843.042
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	4.906.018.925	(393.836.054)	4.512.182.871
KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	38.258.828	640.082.818	678.341.646
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	182.819.395	(182.612.895)	206.500
KEMENTERIAN KESEHATAN	321.161.627	(290.391.627)	30.770.000
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	776.396.872	914.433.301	1.690.830.173
KEMENTERIAN KEUANGAN	1.100.185.587	227.830.574	1.328.016.161
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	145.030.697	280.426.101	425.456.798
KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	-	25.000	25.000
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	130.186.869	(16.007.622)	114.179.247
KEMENTERIAN LUAR NEGERI	124.956.673.207	(6.404.307.469)	118.552.365.738
KEMENTERIAN PARIWISATA	-	1.812.991.510	1.812.991.510
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1.530.270.338	(1.466.683.137)	63.587.201
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	222.559.093	222.559.093
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.560.000	(1.560.000)	-
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	26.814.183.293	(20.941.749.579)	5.872.433.714
KEMENTERIAN PERDAGANGAN	4.095.346.883	478.784.717	4.574.131.600

Nama BA	Tahun 2023		
	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	86.480.178	(2.185.863)	84.294.315
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	665.013.496	(53.078.200)	611.935.296
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	546.342.802	(532.283.325)	14.059.477
KEMENTERIAN PERTAHANAN	805.000	202.399.090	203.204.090
KEMENTERIAN PERTANIAN	619.103.780	(294.157.950)	324.945.830
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	36.343.556.425	(9.060.857.091)	27.282.699.334
KEMENTERIAN SOSIAL	604.485.757	(277.787.568)	326.698.189
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	340.703.385	560.240.898	900.944.283
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	576.696.310	(76.696.310)	500.000.000
KOMISI PEMILIHAN UMUM	986.509.612	4.357.300.724	5.343.810.336
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	449.000	449.000
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	34.425.000	(34.425.000)	-
MAHKAMAH AGUNG	271.770.124	(237.524.124)	34.246.000
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	66.600.000	(51.650.000)	14.950.000
SEKRETARIAT KABINET	683.175.177	117.628.344	800.803.521
	215.927.152.362	**(18.216.293.568)**	**197.710.858.794**

KAS PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA BERASAL DARI HIBAH LANGSUNG TAHUN 2023

Kode KPPN	KPPN	TA 2023		
		NERACA LAJUR		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
001	BANDA ACEH	-	142.672.495.274	142.672.495.274
002	LANGSA	-	32.430.641.258	32.430.641.258
003	MEULABOH	-	38.964.024.760	38.964.024.760
004	MEDAN I	-	180.904.269.700	180.904.269.700
005	PEMATANG SIANTAR	-	34.181.480.000	34.181.480.000
006	PADANG SIDEMPUAN	-	57.408.187.920	57.408.187.920
007	GUNUNG SITOLI	-	4.050.000.000	4.050.000.000
008	PEKANBARU	7.506.000	170.775.611.767	170.783.117.767
009	TANJUNG PINANG	-	124.948.016.400	124.948.016.400
010	PADANG	405.393	147.469.396.842	147.469.802.235
011	BUKITTINGGI	-	34.633.766.400	34.633.766.400
012	JAMBI	-	148.098.666.960	148.098.666.960
013	SUNGAI PENUH	-	15.800.000.000	15.800.000.000
014	PALEMBANG	-	320.987.183.908	320.987.183.908
015	PANGKAL PINANG	-	110.599.248.173	110.599.248.173
016	BENGKULU	-	57.613.059.000	57.613.059.000
017	BANDAR LAMPUNG	-	154.905.427.780	154.905.427.780
020	SERANG	8.675.610.000	348.015.096.400	356.690.706.400
021	PURWAKARTA	-	16.921.615.900	16.921.615.900
022	BANDUNG I	5.086.601.000	516.871.770.313	521.958.371.313
023	BOGOR	-	78.008.266.484	78.008.266.484
024	CIREBON	-	60.097.832.640	60.097.832.640
025	TASIKMALAYA	-	41.178.047.790	41.178.047.790
026	SEMARANG I	-	213.550.462.000	213.550.462.000
027	PURWOREJO	-	32.927.700.000	32.927.700.000
028	SURAKARTA	-	37.383.668.000	37.383.668.000
029	PURWOKERTO	-	35.439.292.400	35.439.292.400
030	YOGYAKARTA	-	99.045.951.950	99.045.951.950
031	SURABAYA I	-	880.081.862.911	880.081.862.911
032	MALANG	-	112.050.525.585	112.050.525.585
033	MADIUN	-	85.639.959.000	85.639.959.000
034	KEDIRI	-	92.568.166.824	92.568.166.824
035	BONDOWOSO	-	60.622.870.000	60.622.870.000
036	PAMEKASAN	-	89.599.997.000	89.599.997.000
037	DENPASAR	-	197.644.771.200	197.644.771.200
038	MATARAM	2.350.000.000	116.083.273.499	118.433.273.499
039	KUPANG	-	190.016.190.400	190.016.190.400
040	ENDE	-	1.500.000.000	1.500.000.000
041	WAINGAPU	-	20.872.187.060	20.872.187.060
042	PONTIANAK	2.818.736.491	210.610.255.069	213.428.991.560
043	PALANGKARAYA	-	122.085.138.439	122.085.138.439
044	SAMPIT	-	43.076.174.580	43.076.174.580
045	BANJARMASIN	-	221.646.479.216	221.646.479.216
046	SAMARINDA	9.501.907.000	357.837.649.445	367.339.556.445
047	BALIKPAPAN	12.987.805.231	125.463.224.680	138.451.029.911
048	TARAKAN	-	12.620.798.700	12.620.798.700
049	MANADO	-	25.856.583.200	25.856.583.200
050	GORONTALO	3.999.997.100	85.709.709.233	89.709.706.333
051	PALU	-	82.405.280.900	82.405.280.900
052	POSO	61.321.753	53.505.256.218	53.566.577.971
053	LUWUK	-	26.000.000.000	26.000.000.000
054	MAKASSAR I	-	311.172.099.131	311.172.099.131
055	WATAMPONE	-	50.576.110.800	50.576.110.800
056	BANTAENG	-	29.228.400.000	29.228.400.000
057	PARE PARE	-	46.962.769.920	46.962.769.920

Kode KPPN	KPPN	TA 2023		
		NERACA LAJUR		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
058	PALOPO	-	12.197.224.020	12.197.224.020
060	KENDARI	-	299.833.252.002	299.833.252.002
061	AMBON	-	67.760.542.560	67.760.542.560
062	TERNATE	5.535.284.000	23.597.093.157	29.132.377.157
063	JAYAPURA	1.144.878.982	92.518.505.907	93.663.384.889
064	BIAK	-	7.910.578.300	7.910.578.300
065	MANOKWARI	5.247.041.746	151.775.515.100	157.022.556.846
066	SORONG	-	17.599.970.000	17.599.970.000
067	FAK FAK	-	35.098.006.800	35.098.006.800
068	MERAUKE	-	49.066.376.000	49.066.376.000
070	LUBUK LINGGAU	-	42.247.000.000	42.247.000.000
071	BIMA	-	17.924.525.000	17.924.525.000
072	PEKALONGAN	-	23.550.000.000	23.550.000.000
073	BOJONEGORO	-	32.354.911.769	32.354.911.769
074	TAPAKTUAN	-	22.687.419.336	22.687.419.336
075	RANTAU PRAPAT	753	24.944.686.447	24.944.687.200
076	TANJUNG BALAI ASAHAN	-	20.000.000.000	20.000.000.000
077	SIJUNJUNG	-	20.496.492.400	20.496.492.400
078	MUARA BUNGO	-	22.204.543.600	22.204.543.600
079	SINTANG	-	31.239.493.103	31.239.493.103
080	BUNTOK	-	42.179.020.220	42.179.020.220
081	KOTABARU	-	27.459.349.600	27.459.349.600
083	TAHUNA	-	1.000.000.000	1.000.000.000
085	NABIRE	-	60.746.830.000	60.746.830.000
086	KARAWANG	-	35.436.722.188	35.436.722.188
087	SUMEDANG	-	600.000.000	600.000.000
088	JAKARTA III	65.952.813.292	(65.952.813.292)	-
089	LHOKSEUMAWE	-	42.800.000.000	42.800.000.000
090	SOLOK	-	20.976.759.888	20.976.759.888
091	LUBUK SIKAPING	-	19.977.770.280	19.977.770.280
092	RENGAT	-	31.577.278.257	31.577.278.257
093	SINGKAWANG	-	21.428.092.000	21.428.092.000
094	KETAPANG	-	37.560.528.030	37.560.528.030
095	BANDUNG II	-	222.680.299.018	222.680.299.018
096	GARUT	-	1.500.000.000	1.500.000.000
097	PATI	-	27.400.000.000	27.400.000.000
098	MOJOKERTO	-	59.870.712.060	59.870.712.060
099	PACITAN	-	14.800.000.000	14.800.000.000
100	BANYUWANGI	-	36.078.316.700	36.078.316.700
101	SUMBAWA BESAR	-	4.596.420.000	4.596.420.000
102	PANGKALAN BUN	-	26.288.576.800	26.288.576.800
103	BAU BAU	-	56.789.248.000	56.789.248.000
105	KUTACANE	-	10.517.280.000	10.517.280.000
106	SIBOLGA	-	8.562.708.000	8.562.708.000
107	TANJUNG PANDAN	-	19.796.427.200	19.796.427.200
109	BATURAJA	-	52.544.738.400	52.544.738.400
110	BARABAI	-	38.401.672.560	38.401.672.560
111	RUTENG	-	11.578.605.200	11.578.605.200
112	TOBELO	-	1.700.000.000	1.700.000.000
113	WAMENA	-	45.883.520.680	45.883.520.680
115	MAGELANG	-	40.644.774.000	40.644.774.000
116	KOTABUMI	-	59.576.044.970	59.576.044.970
117	PUTUSSIBAU	-	21.715.256.000	21.715.256.000
118	TEGAL	-	51.932.687.000	51.932.687.000
119	SIDIKALANG	-	34.207.069.460	34.207.069.460
120	DUMAI	-	55.134.681.940	55.134.681.940
121	MANNA	-	19.600.400.000	19.600.400.000

Kode KPPN	KPPN	TA 2023		
		NERACA LAJUR		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
122	TAKENGON	-	16.052.914.232	16.052.914.232
123	MEDAN II	-	315.142.643.067	315.142.643.067
124	TEBING TINGGI	-	45.987.748.162	45.987.748.162
125	BALIGE	-	22.227.951.600	22.227.951.600
126	METRO LAMPUNG	-	30.843.169.412	30.843.169.412
127	TANGERANG	24.739.750.500	56.987.716.400	81.727.466.900
128	SUKABUMI	-	54.036.341.600	54.036.341.600
129	KUDUS	-	51.040.967.000	51.040.967.000
130	CILACAP	-	13.160.000.000	13.160.000.000
131	JEMBER	-	62.182.317.347	62.182.317.347
132	SINGARAJA	-	28.020.535.080	28.020.535.080
133	JAKARTA IV	-	390.390.923.420	390.390.923.420
134	SEMARANG II	3.500.000.000	393.748.102.400	397.248.102.400
137	BATAM	-	15.660.320.000	15.660.320.000
139	JAKARTA V	84.287.564.044	134.451.323.360	218.738.887.404
140	KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	2.336.726.336.951	(878.261.931.680)	1.458.464.405.271
141	TIMIKA	-	67.345.390.600	67.345.390.600
142	PAINAN	-	500.000.000	500.000.000
143	KUALA TUNGKAL	-	37.057.806.277	37.057.806.277
144	LAHAT	-	71.016.795.468	71.016.795.468
145	LIWA	-	8.961.042.771	8.961.042.771
146	CURUP	-	14.412.084.446	14.412.084.446
147	KUNINGAN	-	28.600.000.000	28.600.000.000
148	KLATEN	-	30.800.000.000	30.800.000.000
149	WONOSARI	-	15.214.177.000	15.214.177.000
150	BLITAR	-	41.298.062.800	41.298.062.800
151	TANJUNG	-	37.078.339.960	37.078.339.960
152	NUNUKAN	-	13.600.000.000	13.600.000.000
153	TANJUNG REDEP	-	15.166.352.340	15.166.352.340
154	AMLAPURA	-	35.095.097.000	35.095.097.000
155	BENTENG	-	6.400.000.000	6.400.000.000
156	KOLAKA	-	46.634.944.018	46.634.944.018
157	RAHA	-	34.894.935.600	34.894.935.600
158	KOTAMOBAGU	-	10.703.814.000	10.703.814.000
159	BANGKO	-	24.535.600.000	24.535.600.000
160	SEKAYU	-	61.807.950.641	61.807.950.641
161	RANGKASBITUNG	-	39.259.276.000	39.259.276.000
162	SRAGEN	-	29.600.000.000	29.600.000.000
163	PURWODADI	-	34.298.082.800	34.298.082.800
164	BANJARNEGARA	-	27.346.497.200	27.346.497.200
165	SIDOARJO	2.000.000.000	41.200.000.000	43.200.000.000
166	TUBAN	-	29.717.779.200	29.717.779.200
167	SANGGAU	-	35.003.928.508	35.003.928.508
168	PELAIHARI	-	31.611.062.000	31.611.062.000
170	MAKALE	-	20.993.762.800	20.993.762.800
171	BEKASI	5.995.310.000	77.300.690.000	83.296.000.000
172	ATAMBUA	397.265.543	15.093.239.416	15.490.504.959
173	MASOHI	-	7.637.487.000	7.637.487.000
174	LARANTUKA	-	22.284.839.980	22.284.839.980
175	JAKARTA VI	8.955.452.079	82.487.376.674	91.442.828.753
176	WATES	-	12.960.000.000	12.960.000.000
178	MAMUJU	-	16.000.000.000	16.000.000.000
179	BITUNG	-	5.000.000.000	5.000.000.000
180	MARISA	-	16.002.634.780	16.002.634.780
181	MUKOMUKO	-	10.200.000.000	10.200.000.000
182	JAKARTA VII	305.737.141.978	(29.379.949.917)	276.357.192.061
185	TANJUNG SELOR	-	99.522.323.320	99.522.323.320

Kode KPPN	KPPN	TA 2023		
		NERACA LAJUR		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
	TOTAL	2.895.708.729.836	11.096.844.487.771	13.992.553.217.607

RINCIAN KAS HIBAH PER K/L TAHUN 2023

Nama BA	Tahun 2023		
	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
BADAN NARKOTIKA NASIONAL	61.322.506	(54.968.706)	6.353.800
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	78.123.346.881	24.545.558	78.147.892.439
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	350.306.400	(350.306.400)	-
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	22.968.982	2.526.508.211.667	2.526.531.180.649
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	3.461.685.409	2.472.847.084	5.934.532.493
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	-	200.000.000.000	200.000.000.000
KEMENTERIAN AGAMA	13.905.984.780	(6.866.384.780)	7.039.600.000
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	84.287.564.044	(63.986.174.967)	20.301.389.077
KEMENTERIAN DALAM NEGERI	-	231.332.699.525	231.332.699.525
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN	-	570.000	570.000
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	100.173.396	8.702.562.166	8.802.735.562
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	590.370.647.054	(108.879.872.060)	481.490.774.994
KEMENTERIAN KESEHATAN	1.651.499.391.677	(1.014.328.970.240)	637.170.421.437
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	-	50.629.000	50.629.000
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	7.563.181.994	5.110.973.191	12.674.155.185
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14.613	(14.613)	-
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	9.000.611.655	14.852.827	9.015.464.482
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	5.451.514.611	496.744.085	5.948.258.696
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	5.013.034.109	(2.233.943.707)	2.779.090.402
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	406.227	(406.227)	-
KEMENTERIAN PERTAHANAN	9.499.997.100	(3.331.563.100)	6.168.434.000
KEMENTERIAN PERTANIAN	4.312.675.828	(2.115.190.583)	2.197.485.245
KEMENTERIAN SOSIAL	305.737.141.978	(29.379.949.917)	276.357.192.061
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	111.239.965.093	(38.947.346.912)	72.292.618.181
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	4.136.753	2.170.658.312	2.174.795.065
KOMISI PEMILIHAN UMUM	247.041.746	9.405.143.578.281	9.405.390.620.027
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	9.460.307.000	(8.713.981.713)	746.325.287
MAHKAMAH AGUNG	5.995.310.000	(5.995.310.000)	-
TOTAL	**2.895.708.729.836**	**11.096.844.487.771**	**13.992.553.217.607**

RINCIAN KAS PADA BLU TAHUN 2023

Kode KPPN	TA 2023			
	NERACA LAJUR			
	KPPN	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
001	BANDA ACEH	193.995.955.654	(78.835.965.536)	115.159.990.118
004	MEDAN I	443.311.637.127	85.172.406.254	528.484.043.381
006	PADANG SIDEMPUAN	-	889.623.386	889.623.386
008	PEKANBARU	153.488.988.919	(19.132.633.754)	134.356.355.165
009	TANJUNG PINANG	-	7.047.917.654	7.047.917.654
010	PADANG	190.074.381.173	(67.108.261.001)	122.966.120.172
011	BUKITTINGGI	113.770.906.963	37.673.923.439	151.444.830.402
012	JAMBI	184.763.328.037	(17.970.361.299)	166.792.966.738
014	PALEMBANG	749.469.767.686	(95.074.063.097)	654.395.704.589
016	BENGKULU	116.598.966.166	31.963.314.816	148.562.280.982
017	BANDAR LAMPUNG	352.968.177.234	(60.711.001.418)	292.257.175.816
018	JAKARTA I	7.004.185.028.728	385.104.856.329	7.389.289.885.057
019	JAKARTA II	49.189.345.247.764	16.334.021.281.523	65.523.366.529.287
020	SERANG	207.282.781.238	18.516.989.576	225.799.770.814
022	BANDUNG I	958.293.952.522	5.598.126.093	963.892.078.615
023	BOGOR	160.590.597.416	(19.187.506.267)	141.403.091.149
024	CIREBON	62.553.664.305	4.540.255.572	67.093.919.877
025	TASIKMALAYA	35.178.621.592	7.624.999.810	42.803.621.402
026	SEMARANG I	546.531.144.154	(416.623.644.090)	129.907.500.064
028	SURAKARTA	387.851.933.224	130.585.424.560	518.437.357.784
029	PURWOKERTO	116.240.122.904	(17.507.630.988)	98.732.491.916
030	YOGYAKARTA	1.004.720.176.263	(31.766.257.451)	972.953.918.812
031	SURABAYA I	275.509.475.822	(121.883.791.648)	153.625.684.174
032	MALANG	533.409.184.006	(30.191.093.781)	503.218.090.225
033	MADIUN	9.765.209.731	(3.878.218.000)	5.886.991.731
034	KEDIRI	117.408.897.685	(33.635.916.222)	83.772.981.463
035	BONDOWOSO	29.581.077.490	1.512.252	29.582.589.742
036	PAMEKASAN	-	43.117.492.279	43.117.492.279
037	DENPASAR	763.292.304.729	(276.804.294.126)	486.488.010.603
038	MATARAM	188.002.745.950	(1.183.053.520)	186.819.692.430
039	KUPANG	145.162.584.505	(3.435.023.374)	141.727.561.131
042	PONTIANAK	298.734.977.983	(74.407.586.311)	224.327.391.672
043	PALANGKARAYA	44.860.171.360	(742.305.577)	44.117.865.783
045	BANJARMASIN	128.410.359.522	123.085.836.231	251.496.195.753
046	SAMARINDA	149.810.838.761	48.375.082.069	198.185.920.830
047	BALIKPAPAN	51.735.450.994	(16.482.484.191)	35.252.966.803
048	TARAKAN	11.659.408.594	1.515.585.366	13.174.993.960
049	MANADO	305.609.851.206	(64.043.989.461)	241.565.861.745
050	GORONTALO	10.809.339.769	3.979.666.538	14.789.006.307
051	PALU	115.011.281.743	54.241.165.635	169.252.447.378
054	MAKASSAR I	400.425.051.583	48.915.013.766	449.340.065.349
058	PALOPO	-	467.282.841	467.282.841
060	KENDARI	87.448.714.389	5.502.537.982	92.951.252.371
061	AMBON	15.829.651.401	9.922.595.962	25.752.247.363

Kode KPPN	TA 2023			
	NERACA LAJUR			
	KPPN	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
062	TERNATE	49.195.294.976	26.883.033.279	76.078.328.255
063	JAYAPURA	45.876.726.319	49.357.486.710	95.234.213.029
065	MANOKWARI	-	4.038.109.710	4.038.109.710
066	SORONG	16.722.375.283	9.903.692.479	26.626.067.762
072	PEKALONGAN	-	5.251.910.261	5.251.910.261
073	BOJONEGORO	6.846.624.487	(3.618.150.656)	3.228.473.831
086	KARAWANG	236.701.642.674	60.696.897.565	297.398.540.239
088	JAKARTA III	1.079.144.745.553	(27.407.198.168)	1.051.737.547.385
089	LHOKSEUMAWE	-	31.854.154.633	31.854.154.633
095	BANDUNG II	115.613.430.955	10.166.989.802	125.780.420.757
096	GARUT	19.332.176.603	(13.677.509.744)	5.654.666.859
098	MOJOKERTO	18.759.908.461	(13.122.189.688)	5.637.718.773
100	BANYUWANGI	6.744.508.738	(1.255.940.242)	5.488.568.496
111	RUTENG	-	59.272.500	59.272.500
115	MAGELANG	207.048.106.192	(52.008.837.757)	155.039.268.435
118	TEGAL	28.472.059.130	2.035.008.220	30.507.067.350
123	MEDAN II	174.587.316.125	6.827.571.754	181.414.887.879
124	TEBING TINGGI	13.467.662.176	7.189.893	13.474.852.069
127	TANGERANG	2.433.629.652.527	(2.352.470.309.667)	81.159.342.860
128	SUKABUMI	3.535.237.298	366.852.990	3.902.090.288
129	KUDUS	-	1.639.456.096	1.639.456.096
131	JEMBER	253.417.393.923	30.706.011.425	284.123.405.348
132	SINGARAJA	16.854.927.079	9.011.242.834	25.866.169.913
133	JAKARTA IV	884.039.098.915	172.412.398.050	1.056.451.496.965
134	SEMARANG II	757.165.697.300	31.086.077.929	788.251.775.229
135	SURABAYA II	539.332.266.840	(268.832.332)	539.063.434.508
136	MAKASSAR II	623.341.702.069	(289.829.750.683)	333.511.951.386
137	BATAM	874.069.587.279	(187.236.580.604)	686.833.006.675
141	TIMIKA	-	7.184.492.306	7.184.492.306
148	KLATEN	250.795.229.262	20.641.864.011	271.437.093.273
150	BLITAR	216.349.100.785	28.215.661.176	244.564.761.961
153	TANJUNG REDEP	926.147.670	313.132.017	1.239.279.687
163	PURWODADI	136.625.358.756	24.103.444.216	160.728.802.972
165	SIDOARJO	42.269.227.717	(10.907.322.787)	31.361.904.930
171	BEKASI	51.141.010.555	13.585.937.991	64.726.948.546
175	JAKARTA VI	1.327.389.309.113	95.880.037.043	1.423.269.346.156
182	JAKARTA VII	2.688.137.399.915	(205.327.471.629)	2.482.809.928.286
	TOTAL	**78.971.222.880.967**	**13.422.355.639.754**	**92.393.578.520.721**

RINCIAN KAS BLU PER K/L TAHUN 2023

Nama BA	Tahun 2023		
	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	874.069.587.279	(219.512.545.324)	654.557.041.955
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	3.084.143.002	2.861.687.462	5.945.830.464
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	10.002.339.850	(4.102.413.626)	5.899.926.224
KEMENTERIAN AGAMA	2.256.345.239.630	200.131.602.278	2.456.476.841.908
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	258.354.755.716	19.130.982.166	277.485.737.882
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	99.618.258.421	42.111.163.549	141.729.421.970
KEMENTERIAN KESEHATAN	7.141.556.551.270	(522.777.152.919)	6.618.779.398.351
KEMENTERIAN KEUANGAN	49.098.074.663.450	16.339.773.074.444	65.437.847.737.894
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.174.913.946.437	338.575.767.285	6.513.489.713.722
KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	1.229.590.027.465	72.110.002.332	1.301.700.029.797
KEMENTERIAN PARIWISATA	529.162.644	745.244.557	1.274.407.201
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	197.273.848.579	2.380.807.533	199.654.656.112
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	6.870.719.402.094	(2.529.397.848.101)	4.341.321.553.993
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1.157.915.880.099	121.827.727.666	1.279.743.607.765
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	111.321.618.622	35.076.742.738	146.398.361.360
KEMENTERIAN PERTAHANAN	856.952.935.634	(261.838.068.183)	595.114.867.451
KEMENTERIAN PERTANIAN	159.899.342.602	(2.434.240.449)	157.465.102.153
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	804.951.616.067	49.753.648.507	854.705.264.574
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1.666.049.562.106	(262.060.542.161)	1.403.989.019.945
TOTAL	**78.971.222.880.967**	**13.422.355.639.754**	**92.393.578.520.721**

RINCIAN KAS BADAN LAYANAN UMUM TAHUN 2023

KODE K/L	NAMA K/L	KAS BLU	INVESTASI JK PENDEK BLU
999	BENDAHARA UMUM NEGARA	92.393.578.520.721	-
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	36.953.238.523.654	28.449.253.233.849
059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.185.981.614.100	2.325.000.000.000
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	3.995.807.026.504	2.622.972.371.847
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	3.242.933.442.879	1.098.388.111.114
025	KEMENTERIAN AGAMA	2.216.226.841.908	240.250.000.000
044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	1.301.700.029.797	
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1.300.989.019.945	103.000.000.000
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1.240.694.784.229	39.048.823.536
007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	854.705.264.574	
112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	654.557.041.955	
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	553.114.867.451	42.000.000.000
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	208.706.324.664	68.000.000.000
092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	199.654.656.112	
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	146.398.361.360	
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	30.779.421.970	110.950.000.000
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	26.032.774.492	131.432.327.661
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	5.945.830.464	
124	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	5.899.926.224	
040	KEMENTERIAN PARIWISATA	1.274.407.201	
Total Kas Per K/L		**149.518.218.680.204**	**35.230.294.868.007**
Eliminasi		**(92.393.578.520.721)**	**-**
Total Kas		**57.124.640.159.483**	**35.230.294.868.007**
TOTAL KAS (KAS BLU + INVESTASI JANGKA PENDEK BLU			**92.354.935.027.490**
***)KAS BLU YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA**			**38.643.493.231**
TOTAL KAS PADA BLU			**92.393.578.520.721**

***Nilai berasal dari akun 166213 yang rinciannya hanya ada di LKPP (akun tersebut tidak terdapat pada BUN)**

UANG MUKA REKENING KHUSUS TAHUN 2023

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)
ADB	5.565.010.548	2.740.298.842	2.824.711.706
IFAD	237.160.000	1.459.439.628	(1.222.279.628)
JBIC/OECF	-	-	-
BANK DUNIA	34.143.459.515	15.243.303.991	18.900.155.524
IDB	342.708.000	300.000.000	42.708.000
AUSTRALIA	-	-	-
UNI EROPA	-	-	-
KFW	4.191.208.272	1.135.920.649	3.055.287.623
SBSN	-	-	-
JUMLAH	**44.479.546.335**	**20.878.963.110**	**23.600.583.225**

RINCIAN PIUTANG PNBP DIVIDEN DAN DENDA

PER 31 Desember 2023

Total Piutang	Total Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Total *Net Realizable Value*
49,577,182,163	49,577,182,163	-

No	Nama BUMN		Jumlah	Penyisihan Piutang tak Tertagih (100%)	Net Realizable Value	Keterangan
1	PT Balai Pustaka	2004	196,749,800	196,749,800	-	Telah diserahkan ke PUPNC
2	PT Perkebunan Nusantara II	1999	6,448,400,376	6,448,400,376	-	Dalam proses pengajuan penghapusan ke Menteri Keuangan
3	PT Inhutani V	1999	692,788,265	692,788,265	-	
4	PT Istaka karya	2003	8,391,154,934	8,391,154,934	-	Telah diserahkan ke PUPNC
5	PT Industri Sandang Nusantara	1980-2001	33,132,436,990	33,132,436,990	-	Telah diserahkan ke PUPNC
6	PT Kertas Gowa (telah dilikuidasi)	1972-1980	715,651,799	715,651,799		
Jumlah			**49,577,182,163**	**49,577,182,163**	**-**	

PIUTANG TRANSFER KE DAERAH
Tahun 2023 Audited

No.	Nama Derah	Dana Bagi Hasil	DNF	Dana Keistimewaan	Total Piutang Transfer ke Daerah
1	Provinsi Aceh	126,955,644,846	15,422,333,142		142,377,977,988
2	Kab. Aceh Barat	3,084,265,787	3,602,155,719		6,686,421,506
3	Kab. Aceh Besar	2,178,357,018	6,357,557,929		8,535,914,947
4	Kab. Aceh Selatan	1,629,180,751	7,287,051,094		8,916,231,845
5	Kab. Aceh Singkil	1,490,074,037	658,992,399		2,149,066,436
6	Kab. Aceh Tengah	4,760,308,876	7,229,509,222		11,989,818,098
7	Kab. Aceh Tenggara	1,748,211,726	697,164,687		2,445,376,413
8	Kab. Aceh Timur	8,378,300,128	7,657,977,644		16,036,277,772
9	Kab. Aceh Utara	11,659,995,491	15,605,545,821		27,265,541,312
10	Kab. Bireuen	2,658,099,865	12,300,308,122		14,958,407,987
11	Kab. Pidie	3,281,135,060	10,330,783,444		13,611,918,504
12	Kab. Simeulue	1,622,527,767	2,728,270,470		4,350,798,237
13	Kota Banda Aceh	881,045,781	3,892,139,461		4,773,185,242
14	Kota Sabang	1,624,074,076	2,061,643,797		3,685,717,873
15	Kota Langsa	1,318,419,130	1,410,422,310		2,728,841,440
16	Kota Lhokseumawe	14,877,358,876	5,722,850,007		20,600,208,883
17	Kab. Gayo Lues	1,163,618,097	719,390,953		1,883,009,050
18	Kab. Aceh Barat Daya	1,011,343,634	3,967,302,847		4,978,646,481
19	Kab. Aceh Jaya	1,712,057,168	3,483,644,569		5,195,701,737
20	Kab. Nagan Raya	1,829,258,289	2,823,341,363		4,652,599,652
21	Kab. Aceh Tamiang	16,278,650,718	8,373,618,706		24,652,269,424
22	Kab. Bener Meriah	1,642,495,713	6,015,051,034		7,657,546,747
23	Kab. Pidie Jaya	839,697,015	3,248,395,293		4,088,092,308
24	Kota Subulussalam	12,216	1,429,782,944		1,429,795,160
25	Provinsi Sumatera Utara	55,251,288,774	13,796,302,814		69,047,591,588
26	Kab. Asahan	10,252,229,445	10,238,026,003		20,490,255,448
27	Kab. Dairi	8,871,505,391	10,987,583,953		19,859,089,344
28	Kab. Deli Serdang	5,097,611,187	10,326,000,850		15,423,612,037
29	Kab. Karo	5,771,162,062	8,682,653,562		14,453,815,624
30	Kab. Labuhanbatu	4,986,473,820	6,951,987,483		11,938,461,303
31	Kab. Langkat	49,404,167,201	8,517,635,955		57,921,803,156
32	Kab. Mandailing Natal	24,870,572,101	14,977,054,090		39,847,626,191
33	Kab. Nias	4,644,255,676	15,824,121,665		20,468,377,341
34	Kab. Simalungun	4,561,980,129	20,507,012,604		25,068,992,733
35	Kab. Tapanuli Selatan	153,788,993,687	3,897,019,026		157,686,012,713
36	Kab. Tapanuli Tengah	7,206,000,714	6,568,878,391		13,774,879,105
37	Kab. Tapanuli Utara	6,582,278,342	3,145,018,276		9,727,296,618
38	Kab. Toba Samosir	5,315,311,184	10,672,220,210		15,987,531,394
39	Kota Binjai	5,598,706,298	4,827,014,247		10,425,720,545
40	Kota Medan	9,517	16,563,503,576		16,563,513,093
41	Kota Pematang Siantar	6,266,987,409	3,310,527,059		9,577,514,468
42	Kota Sibolga	4,904,118,630	1,412,296,889		6,316,415,519
43	Kota Tanjung Balai	7,469,187,257	1,967,224,640		9,436,411,897
44	Kota Tebing Tinggi	4,248,821,782	4,615,848,508		8,864,670,290
45	Kota Padang Sidempuan	7,384,681,469	3,934,250,399		11,318,931,868
46	Kab. Pakpak Bharat	5,911,259,567	5,525,500,360		11,436,759,927
47	Kab. Nias Selatan	9,300,423,407	3,936,852,734		13,237,276,141
48	Kab. Humbang Hasundutan	9,439,796,251	3,747,090,801		13,186,887,052
49	Kab. Serdang Bedagai	3,834,160,143	9,365,648,779		13,199,808,922
50	Kab. Samosir	5,104,935,468	3,596,872,921		8,701,808,389
51	Kab. Batu Bara	4,035,825,919	3,919,605,760		7,955,431,679
52	Kab. Padang Lawas	4,968,808,847	3,761,634,587		8,730,443,434

No.	Nama Derah	Dana Bagi Hasil	DNF	Dana Keistimewaan	Total Piutang Transfer ke Daerah
53	Kab. Padang Lawas Utara	5,883,120,017	4,146,166,316		10,029,286,333
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	7,371,363,944	17,176,101,853		24,547,465,797
55	Kab. Labuhanbatu Utara	8,175,316,461	5,855,709,857		14,031,026,318
56	Kab. Nias Utara	4,792,116,395	4,296,963,053		9,089,079,448
57	Kab. Nias Barat	4,582,346,915	993,850,982		5,576,197,897
58	Kota Gunungsitoli	5,258,551,345	3,385,364,359		8,643,915,704
59	Provinsi Sumatera Barat	6,657,186,074	15,965,545,938		22,622,732,012
60	Kab. Lima Puluh Kota	2,231,776,898	8,159,531,384		10,391,308,282
61	Kab. Agam	1,628,904,788	8,847,374,616		10,476,279,404
62	Kab. Kepulauan Mentawai	5,532,948,663	3,343,599,358		8,876,548,021
63	Kab. Padang Pariaman	1,771,773,037	9,833,293,207		11,605,066,244
64	Kab. Pasaman	1,539,203,880	8,629,612,107		10,168,815,987
65	Kab. Pesisir Selatan	2,994,488,614	11,513,621,887		14,508,110,501
66	Kab. Sijunjung	2,628,767,330	3,833,801,644		6,462,568,974
67	Kab. Solok	1,689,978,064	10,767,177,482		12,457,155,546
68	Kab. Tanah Datar	1,499,907,932	7,796,910,370		9,296,818,302
69	Kota Bukit Tinggi	262,948,930	2,231,990,484		2,494,939,414
70	Kota Padang Panjang	714,709,758	2,586,782,127		3,301,491,885
71	Kota Padang	3,842,687,162	6,103,659,136		9,946,346,298
72	Kota Payakumbuh	956,665,863	3,724,561,501		4,681,227,364
73	Kota Sawahlunto	1,698,400,188	4,374,357,383		6,072,757,571
74	Kota Solok	772,875,158	4,321,109,761		5,093,984,919
75	Kota Pariaman	3,085,528,487	3,073,473,672		6,159,002,159
76	Kab. Pasaman Barat	2,206,577,927	8,709,813,360		10,916,391,287
77	Kab. Dharmasraya	2,158,337,882	3,596,062,862		5,754,400,744
78	Kab. Solok Selatan	1,586,782,529	5,693,773,399		7,280,555,928
79	Provinsi Riau	29,814,709,254	15,253,450,089		45,068,159,343
80	Kab. Bengkalis	115,201,864,286	11,178,668,123		126,380,532,409
81	Kab. Indragiri Hilir	12,109,067,644	14,003,359,045		26,112,426,689
82	Kab. Indragiri Hulu	19,339,597,364	14,163,577,143		33,503,174,507
83	Kab. Kampar	31,015,092,840	14,536,756,451		45,551,849,291
84	Kab. Kuantan Singingi	22,405,691,318	15,897,073,096		38,302,764,414
85	Kab. Pelalawan	7,569	10,863,824,959		10,863,832,528
86	Kab. Rokan Hilir	18,984,909,136	8,160,023,658		27,144,932,794
87	Kab. Rokan Hulu	17,177,891,050	7,874,780,985		25,052,672,035
88	Kab. Siak	33,224,502,578	8,061,111,513		41,285,614,091
89	Kota Dumai	7,244,005,636	4,603,507,492		11,847,513,128
90	Kota Pekanbaru	5,546	9,795,591,969		9,795,597,515
91	Kab. Kepulauan Meranti	6,787,503,066	2,845,853,788		9,633,356,854
92	Provinsi Jambi	4,708,603,802	5,156,860,935		9,865,464,737
93	Kab. Batanghari	6,440,352,521	11,021,898,069		17,462,250,590
94	Kab. Bungo	22,318,453,332	9,265,694,620		31,584,147,952
95	Kab. Kerinci	1,530,090,842	5,408,257,549		6,938,348,391
96	Kab. Merangin	3,844,638,981	13,325,204,629		17,169,843,610
97	Kab. Muaro Jambi	14,675,285,399	12,200,080,672		26,875,366,071
98	Kab. Sarolangun	9,375,492,275	5,800,667,568		15,176,159,843
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	1,538,130,399	5,460,951,498		6,999,081,897
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	2,299,785,345	6,142,369,606		8,442,154,951
101	Kab. Tebo	3,192,908,848	11,688,083,052		14,880,991,900
102	Kota Jambi	2,222,125,040	16,929,597,788		19,151,722,828
103	Kota Sungai Penuh	1,365,136,592	3,493,173,559		4,858,310,151
104	Provinsi Sumatera Selatan	87,574,867,713	11,081,399,678		98,656,267,391
105	Kab. Lahat	8,232,071,674	9,269,086,101		17,501,157,775
106	Kab. Musi Banyuasin	14,380,182,851	12,783,669,166		27,163,852,017

No.	Nama Derah	Dana Bagi Hasil	DNF	Dana Keistimewaan	Total Piutang Transfer ke Daerah
107	Kab. Musi Rawas	3,564,450,283	6,792,517,878		10,356,968,161
108	Kab. Muara Enim	80,699,777,529	7,692,413,700		88,392,191,229
109	Kab. Ogan Komering Ilir	16,268,927,520	13,792,929,816		30,061,857,336
110	Kab. Ogan Komering Ulu	16,911,702,005	6,175,250,322		23,086,952,327
111	Kota Palembang	4,363,481,535	16,033,328,322		20,396,809,857
112	Kota Prabumulih	19,906,887,179	6,226,157,468		26,133,044,647
113	Kota Pagar Alam	5,267,458,598	3,408,446,845		8,675,905,443
114	Kota Lubuk Linggau	13,862,441,801	2,798,908,904		16,661,350,705
115	Kab. Banyuasin	15,076,137,705	7,422,042,970		22,498,180,675
116	Kab. Ogan Ilir	24,922,120,808	10,171,697,930		35,093,818,738
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	15,799,018,756	12,946,694,505		28,745,713,261
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	17,399,288,498	4,025,846,795		21,425,135,293
119	Kab. Empat Lawang	4,845,698,082	6,080,279,632		10,925,977,714
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	9,888	2,660,155,178		2,660,165,066
121	Kab. Musi Rawas Utara	7,563	4,470,967,816		4,470,975,379
122	Provinsi Bengkulu	16,641,936,893	2,493,401,457		19,135,338,350
123	Kab. Bengkulu Selatan	3,237,888,055	2,699,092,868		5,936,980,923
124	Kab. Bengkulu Utara	21,784,707,559	8,429,909,785		30,214,617,344
125	Kab. Rejang Lebong	3,578,841,984	12,219,696,260		15,798,538,244
126	Kota Bengkulu	1,592,948,101	10,176,549,705		11,769,497,806
127	Kab. Kaur	3,532,880,226	2,946,705,046		6,479,585,272
128	Kab. Seluma	3,630,583,090	4,214,319,141		7,844,902,231
129	Kab. Mukomuko	3,506,880,094	6,902,662,738		10,409,542,832
130	Kab. Lebong	4,667,660,409	3,631,561,003		8,299,221,412
131	Kab. Kepahiang	3,491,991,854	4,316,840,977		7,808,832,831
132	Kab. Bengkulu Tengah	31,533,315,823	5,420,521,435		36,953,837,258
133	Provinsi Lampung	6,912,206,482	7,265,336,641		14,177,543,123
134	Kab. Lampung Barat	2,605,009,091	2,992,512,720		5,597,521,811
135	Kab. Lampung Selatan	3,599,216,462	6,847,319,143		10,446,535,605
136	Kab. Lampung Tengah	6,626,719,587	18,348,387,902		24,975,107,489
137	Kab. Lampung Utara	5,718,773,660	12,757,549,975		18,476,323,635
138	Kab. Lampung Timur	1,851,909,397	12,983,192,287		14,835,101,684
139	Kab. Tanggamus	12,604,268,700	8,326,149,614		20,930,418,314
140	Kab. Tulang Bawang	2,104,172,934	7,686,027,287		9,790,200,221
141	Kab. Way Kanan	3,230,862,999	6,588,558,151		9,819,421,150
142	Kota Bandar Lampung	1,372,781,280	16,332,772,577		17,705,553,857
143	Kota Metro	1,074,078,024	4,128,396,595		5,202,474,619
144	Kab. Pesawaran	2,903,461,508	5,078,307,854		7,981,769,362
145	Kab. Pringsewu	2,222,257,558	8,437,822,858		10,660,080,416
146	Kab. Mesuji	3,675,978,788	5,167,377,485		8,843,356,273
147	Kab. Tulang Bawang Barat	2,859,350,898	4,403,846,986		7,263,197,884
148	Kab. Pesisir Barat	1,721,158,174	3,632,427,713		5,353,585,887
149	Provinsi DKI Jakarta	7,238	23,214,493,992		23,214,501,230
150	Provinsi Jawa Barat	8,601,768,776	36,987,896,700		45,589,665,476
151	Kab. Bandung	11,268	29,421,229,856		29,421,241,124
152	Kab. Bekasi	3,461,097,463	17,428,423,713		20,889,521,176
153	Kab. Bogor	11,689	39,451,128,604		39,451,140,293
154	Kab. Ciamis	3,424,896,876	11,517,755,689		14,942,652,565
155	Kab. Cianjur	2,951,203,118	12,018,227,147		14,969,430,265
156	Kab. Cirebon	6,962,918,373	24,405,323,030		31,368,241,403
157	Kab. Garut	4,040,942,543	20,807,446,542		24,848,389,085
158	Kab. Indramayu	12,470,456,893	15,900,537,545		28,370,994,438
159	Kab. Karawang	4,038,387,140	17,008,149,990		21,046,537,130
160	Kab. Kuningan	2,767,389,574	22,812,367,239		25,579,756,813

No.	Nama Derah	Dana Bagi Hasil	DNF	Dana Keistimewaan	Total Piutang Transfer ke Daerah
161	Kab. Majalengka	5,111,383,763	13,027,609,496		18,138,993,259
162	Kab. Purwakarta	1,868,488,655	8,517,951,715		10,386,440,370
163	Kab. Subang	5,976,291,569	18,795,962,673		24,772,254,242
164	Kab. Sukabumi	1,644,338,336	20,473,781,406		22,118,119,742
165	Kab. Sumedang	3,925,909,758	12,490,306,999		16,416,216,757
166	Kab. Tasikmalaya	3,512,936,184	15,835,246,881		19,348,183,065
167	Kota Bandung	1,095,509,252	22,799,866,187		23,895,375,439
168	Kota Bekasi	793,265,702	19,553,273,113		20,346,538,815
169	Kota Bogor	11,455	5,011,775,366		5,011,786,821
170	Kota Cirebon	1,535,658,508	2,941,245,959		4,476,904,467
171	Kota Depok	10,886	10,998,673,670		10,998,684,556
172	Kota Sukabumi	2,147,037,467	3,853,325,329		6,000,362,796
173	Kota Tasikmalaya	2,144,677,806	10,669,594,872		12,814,272,678
174	Kota Cimahi	2,111,719,503	7,226,367,378		9,338,086,881
175	Kota Banjar	3,736,818,160	3,522,686,597		7,259,504,757
176	Kab. Bandung Barat	3,132,174,533	19,108,934,450		22,241,108,983
177	Kab. Pangandaran	14,115	3,927,400,350		3,927,414,465
178	Provinsi Jawa Tengah	15,673,858,359	27,653,260,406		43,327,118,765
179	Kab. Banjarnegara	2,258,336,113	11,907,060,052		14,165,396,165
180	Kab. Banyumas	5,174,468,432	18,131,427,393		23,305,895,825
181	Kab. Batang	3,482,752,743	11,419,021,020		14,901,773,763
182	Kab. Blora	22,687,458,721	8,924,342,972		31,611,801,693
183	Kab. Boyolali	3,322,954,886	10,724,089,424		14,047,044,310
184	Kab. Brebes	3,131,110,624	9,199,383,391		12,330,494,015
185	Kab. Cilacap	13,332,406,325	1,563,405,517		14,895,811,842
186	Kab. Demak	3,024,086,238	11,102,989,422		14,127,075,660
187	Kab. Grobogan	8,672,782,263	5,125,189,144		13,797,971,407
188	Kab. Jepara	2,111,697,553	5,866,795,838		7,978,493,391
189	Kab. Karanganyar	3,812,069,954	10,824,736,691		14,636,806,645
190	Kab. Kebumen	3,459,275,099	8,659,503,650		12,118,778,749
191	Kab. Kendal	4,398,021,227	7,066,471,190		11,464,492,417
192	Kab. Klaten	4,116,561,889	16,659,460,081		20,776,021,970
193	Kab. Kudus	22,606,193,338	15,242,223,504		37,848,416,842
194	Kab. Magelang	3,834,287,747	11,694,535,713		15,528,823,460
195	Kab. Pati	2,219,818,967	14,232,658,647		16,452,477,614
196	Kab. Pekalongan	4,196,910,323	6,454,421,798		10,651,332,121
197	Kab. Pemalang	6,075,865,448	8,399,359,177		14,475,224,625
198	Kab. Purbalingga	2,072,728,618	11,845,500,816		13,918,229,434
199	Kab. Purworejo	2,158,869,770	21,254,269,183		23,413,138,953
200	Kab. Rembang	7,712,257,540	7,464,579,175		15,176,836,715
201	Kab. Semarang	3,088,601,131	11,134,734,754		14,223,335,885
202	Kab. Sragen	2,681,611,696	6,663,719,310		9,345,331,006
203	Kab. Sukoharjo	1,366,745,697	10,237,381,312		11,604,127,009
204	Kab. Tegal	2,360,469,561	12,726,147,428		15,086,616,989
205	Kab. Temanggung	3,022,989,131	11,287,455,718		14,310,444,849
206	Kab. Wonogiri	3,852,252,171	9,350,719,441		13,202,971,612
207	Kab. Wonosobo	3,244,168,183	10,064,965,193		13,309,133,376
208	Kota Magelang	397,113,402	2,297,095,560		2,694,208,962
209	Kota Pekalongan	1,619,572,893	5,589,164,558		7,208,737,451
210	Kota Salatiga	646,447,403	2,292,714,524		2,939,161,927
211	Kota Semarang	12,774	7,346,583,072		7,346,595,846
212	Kota Surakarta	3,659,267,264	4,754,339,092		8,413,606,356
213	Kota Tegal	1,131,829,832	3,395,045,289		4,526,875,121
214	Provinsi DI Yogyakarta	1,990,782,218	7,258,614,661	23,842,547,568	33,091,944,447

No.	Nama Derah	Dana Bagi Hasil	DNF	Dana Keistimewaan	Total Piutang Transfer ke Daerah
215	Kab. Bantul	825,735,103	5,709,162,712		6,534,897,815
216	Kab. Gunung Kidul	1,334,073,028	6,263,099,332		7,597,172,360
217	Kab. Kulon Progo	899,819,642	6,038,267,712		6,938,087,354
218	Kab. Sleman	479,478,485	7,002,599,472		7,482,077,957
219	Kota Yogyakarta	2,794,632,539	8,012,397,369		10,807,029,908
220	Provinsi Jawa Timur	35,332,646,040	54,488,724,409		89,821,370,449
221	Kab. Bangkalan	3,073,748,239	8,679,010,291		11,752,758,530
222	Kab. Banyuwangi	96,618,919,472	20,460,954,422		117,079,873,894
223	Kab. Blitar	2,705,603,463	8,978,386,299		11,683,989,762
224	Kab. Bojonegoro	9,863	17,754,219,330		17,754,229,193
225	Kab. Bondowoso	5,320,615,741	15,563,442,710		20,884,058,451
226	Kab. Gresik	8,683	8,952,525,481		8,952,534,164
227	Kab. Jember	2,939,812,234	17,722,202,227		20,662,014,461
228	Kab. Jombang	2,850,983,497	12,887,273,109		15,738,256,606
229	Kab. Kediri	1,972,939,968	17,307,294,408		19,280,234,376
230	Kab. Lamongan	7,722	9,267,420,183		9,267,427,905
231	Kab. Lumajang	1,498,649,622	9,932,693,358		11,431,342,980
232	Kab. Madiun	2,671,045,690	8,744,500,703		11,415,546,393
233	Kab. Magetan	2,410,304,361	11,869,462,345		14,279,766,706
234	Kab. Malang	2,085,311,286	16,356,405,895		18,441,717,181
235	Kab. Mojokerto	2,363,060,513	9,151,961,377		11,515,021,890
236	Kab. Nganjuk	3,840,130,053	12,034,527,157		15,874,657,210
237	Kab. Ngawi	4,742,599,866	10,853,881,598		15,596,481,464
238	Kab. Pacitan	4,873,187,490	9,619,222,352		14,492,409,842
239	Kab. Pamekasan	3,520,226,997	10,240,264,968		13,760,491,965
240	Kab. Pasuruan	3,234,357,239	13,246,055,492		16,480,412,731
241	Kab. Ponorogo	2,917,077,543	5,801,747,843		8,718,825,386
242	Kab. Probolinggo	4,538,855,156	24,608,024,205		29,146,879,361
243	Kab. Sampang	3,153,751,487	10,046,180,013		13,199,931,500
244	Kab. Sidoarjo	13,494,694,208	30,893,014,322		44,387,708,530
245	Kab. Situbondo	3,031,170,068	12,603,015,959		15,634,186,027
246	Kab. Sumenep	4,987,320,067	18,468,836,794		23,456,156,861
247	Kab. Trenggalek	3,797,138,840	9,623,955,158		13,421,093,998
248	Kab. Tuban	9,006,541,615	11,488,964,861		20,495,506,476
249	Kab. Tulungagung	5,407,540,580	16,664,416,674		22,071,957,254
250	Kota Blitar	10,914	2,061,071,139		2,061,082,053
251	Kota Kediri	27,952,063,249	5,749,181,837		33,701,245,086
252	Kota Madiun	1,093,336,262	1,915,446,046		3,008,782,308
253	Kota Malang	1,118,239,066	5,389,999,717		6,508,238,783
254	Kota Mojokerto	11,374	5,435,070,635		5,435,082,009
255	Kota Pasuruan	1,247,847,649	4,192,900,159		5,440,747,808
256	Kota Probolinggo	2,223,368,009	2,335,483,067		4,558,851,076
257	Kota Surabaya	10,288	16,824,724,786		16,824,735,074
258	Kota Batu	1,015,223,616	2,258,004,880		3,273,228,496
259	Provinsi Kalimantan Barat	15,034,088,385	6,305,901,188		21,339,989,573
260	Kab. Bengkayang	1,681,670,622	5,724,631,349		7,406,301,971
261	Kab. Landak	5,782,226,187	4,754,168,954		10,536,395,141
262	Kab. Kapuas Hulu	7,842,058,636	10,646,292,889		18,488,351,525
263	Kab. Ketapang	35,869,946,929	6,135,436,268		42,005,383,197
264	Kab. Mempawah	2,633,616,732	8,253,417,375		10,887,034,107
265	Kab. Sambas	2,852,970,515	8,168,379,929		11,021,350,444
266	Kab. Sanggau	5,776,222,508	8,539,403,951		14,315,626,459
267	Kab. Sintang	10,475,172,638	6,935,073,618		17,410,246,256
268	Kota Pontianak	6,278	6,234,068,249		6,234,074,527

No.	Nama Derah	Dana Bagi Hasil	DNF	Dana Keistimewaan	Total Piutang Transfer ke Daerah
269	Kota Singkawang	1,109,479,007	2,967,186,895		4,076,665,902
270	Kab. Sekadau	1,154,248,482	7,412,203,287		8,566,451,769
271	Kab. Melawi	7,797,368,420	3,224,798,368		11,022,166,788
272	Kab. Kayong Utara	2,528,313,333	1,498,349,206		4,026,662,539
273	Kab. Kubu Raya	3,268,502,928	6,974,036,270		10,242,539,198
274	Provinsi Kalimantan Tengah	16,020,864,403	3,085,391,631		19,106,256,034
275	Kab. Barito Selatan	6,289,498,935	6,385,231,738		12,674,730,673
276	Kab. Barito Utara	7,530	6,083,133,704		6,083,141,234
277	Kab. Kapuas	8,537	8,759,036,513		8,759,045,050
278	Kab. Kotawaringin Barat	5,041,282,179	6,594,878,455		11,636,160,634
279	Kab. Kotawaringin Timur	6,814,962,822	7,041,565,295		13,856,528,117
280	Kota Palangkaraya	1,670,163,199	4,751,912,471		6,422,075,670
281	Kab. Katingan	3,534,278,449	6,279,595,637		9,813,874,086
282	Kab. Seruyan	8,283	4,743,513,959		4,743,522,242
283	Kab. Sukamara	1,140,095,446	2,638,008,710		3,778,104,156
284	Kab. Lamandau	2,759,199,753	4,484,736,153		7,243,935,906
285	Kab. Gunung Mas	6,752,768,830	7,197,288,861		13,950,057,691
286	Kab. Pulang Pisau	10,103	4,762,916,693		4,762,926,796
287	Kab. Murung Raya	9,839	2,778,867,100		2,778,876,939
288	Kab. Barito Timur	3,218,131,177	2,996,180,576		6,214,311,753
289	Provinsi Kalimantan Selatan	81,157,991,096	3,587,841,558		84,745,832,654
290	Kab. Banjar	58,173,040,119	9,667,640,259		67,840,680,378
291	Kab. Barito Kuala	25,555,849,467	8,822,911,372		34,378,760,839
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	9,601,482,467	5,641,022,649		15,242,505,116
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	8,113,930,578	11,594,782,663		19,708,713,241
294	Kab. Hulu Sungai Utara	7,879,137,745	7,507,225,889		15,386,363,634
295	Kab. Kotabaru	8,754	27,314,209,688		27,314,218,442
296	Kab. Tabalong	34,676,931,030	4,851,822,088		39,528,753,118
297	Kab. Tanah Laut	224,000,956,051	14,968,797,161		238,969,753,212
298	Kab. Tapin	10,164	4,497,634,898		4,497,645,062
299	Kota Banjarbaru	7,351,297,231	4,744,894,696		12,096,191,927
300	Kota Banjarmasin	7,161	4,561,958,268		4,561,965,429
301	Kab. Balangan	8,272	9,916,835,898		9,916,844,170
302	Kab. Tanah Bumbu	8,710	4,068,536,962		4,068,545,672
303	Provinsi Kalimantan Timur	5,508	3,086,412,088		3,086,417,596
304	Kab. Berau	9,481	7,742,807,516		7,742,816,997
305	Kab. Kutai Kartanegara	6,712	20,067,365,300		20,067,372,012
306	Kab. Kutai Barat	13,152,814,126	5,537,787,727		18,690,601,853
307	Kab. Kutai Timur	8,125	13,550,585,650		13,550,593,775
308	Kab. Paser	12,092	10,390,918,291		10,390,930,383
309	Kota Balikpapan	7,533	7,130,833,732		7,130,841,265
310	Kota Bontang	6,983	4,429,063,217		4,429,070,200
311	Kota Samarinda	7,803	8,194,697,951		8,194,705,754
312	Kab. Penajam Paser Utara	9,033,562,077	3,306,895,389		12,340,457,466
313	Kab. Mahakam Ulu	10,706	1,601,725,951		1,601,736,657
314	Provinsi Sulawesi Utara	90,991,736,558	5,411,651,185		96,403,387,743
315	Kab. Bolaang Mongondow	26,791,677,999	5,065,363,246		31,857,041,245
316	Kab. Minahasa	10,753,242,348	8,609,846,740		19,363,089,088
317	Kab. Sangihe	12,797,470,251	4,530,458,321		17,327,928,572
318	Kota Bitung	170,437,311,665	3,668,934,056		174,106,245,721
319	Kota Manado	11,958,434,996	8,152,273,464		20,110,708,460
320	Kab. Kepulauan Talaud	10,789,579,717	6,244,340,284		17,033,920,001
321	Kab. Minahasa Selatan	11,120,839,445	10,136,534,449		21,257,373,894
322	Kota Tomohon	7,153,976,835	1,606,542,304		8,760,519,139

No.	Nama Derah	Dana Bagi Hasil	DNF	Dana Keistimewaan	Total Piutang Transfer ke Daerah
323	Kab. Minahasa Utara	60,348,137,052	4,821,751,181		65,169,888,233
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	10,608,394,061	4,598,084,579		15,206,478,640
325	Kota Kotamobagu	10,847,931,445	3,359,856,107		14,207,787,552
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	11,276,673,257	4,773,595,527		16,050,268,784
327	Kab. Minahasa Tenggara	9,314,256,640	6,163,472,440		15,477,729,080
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	16,856,284,218	1,876,069,488		18,732,353,706
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	32,754,568,095	1,925,317,526		34,679,885,621
330	Provinsi Sulawesi Tengah	18,730,549,755	7,336,215,964		26,066,765,719
331	Kab. Banggai	24,026,890,869	8,472,373,832		32,499,264,701
332	Kab. Banggai Kepulauan	4,635,115,059	2,687,127,256		7,322,242,315
333	Kab. Buol	5,790,475,951	5,401,706,403		11,192,182,354
334	Kab. Tolitoli	4,783,330,689	5,913,140,562		10,696,471,251
335	Kab. Donggala	7,463,584,444	6,154,796,967		13,618,381,411
336	Kab. Morowali	8,578	1,659,667,923		1,659,676,501
337	Kab. Poso	7,683,228,293	7,856,254,834		15,539,483,127
338	Kota Palu	665,838,615	3,971,607,731		4,637,446,346
339	Kab. Parigi Moutong	5,414,182,022	11,240,668,007		16,654,850,029
340	Kab. Tojo Una Una	5,428,123,390	4,517,856,461		9,945,979,851
341	Kab. Sigi	4,165,358,142	6,208,327,170		10,373,685,312
342	Kab. Banggai Laut	3,367,961,472	2,009,250,366		5,377,211,838
343	Kab. Morowali Utara	6,550,182,796	3,287,385,640		9,837,568,436
344	Provinsi Sulawesi Selatan	11,660,221,864	13,600,903,550		25,261,125,414
345	Kab. Bantaeng	842,828,852	2,502,346,535		3,345,175,387
346	Kab. Barru	1,535,345,050	6,353,436,624		7,888,781,674
347	Kab. Bone	4,327,000,284	19,073,967,384		23,400,967,668
348	Kab. Bulukumba	5,778,646,431	13,544,637,672		19,323,284,103
349	Kab. Enrekang	1,703,449,991	2,552,797,684		4,256,247,675
350	Kab. Gowa	1,634,974,943	10,495,980,725		12,130,955,668
351	Kab. Jeneponto	2,386,284,679	5,430,078,996		7,816,363,675
352	Kab. Luwu	2,800,501,727	5,398,127,156		8,198,628,883
353	Kab. Luwu Utara	4,160,518,322	4,445,311,322		8,605,829,644
354	Kab. Maros	6,026,240,378	9,977,566,407		16,003,806,785
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	8,524,613,017	5,161,705,304		13,686,318,321
356	Kota Palopo	753,379,356	5,243,926,216		5,997,305,572
357	Kab. Luwu Timur	3,554,806,790	4,898,870,221		8,453,677,011
358	Kab. Pinrang	1,699,353,317	2,092,833,351		3,792,186,668
359	Kab. Sinjai	1,316,569,346	5,281,253,244		6,597,822,590
360	Kab. Kepulauan Selayar	2,016,914,271	1,696,820,159		3,713,734,430
361	Kab. Sidenreng Rappang	1,904,555,036	13,699,990,370		15,604,545,406
362	Kab. Soppeng	1,815,808,911	2,862,958,535		4,678,767,446
363	Kab. Takalar	1,801,498,553	4,720,190,273		6,521,688,826
364	Kab. Tana Toraja	1,708,089,143	8,675,168,851		10,383,257,994
365	Kab. Wajo	24,972,127,603	11,174,325,753		36,146,453,356
366	Kota Parepare	1,054,499,169	2,553,656,109		3,608,155,278
367	Kota Makassar	10,070	6,569,451,845		6,569,461,915
368	Kab. Toraja Utara	1,937,799,052	9,403,542,049		11,341,341,101
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	5,801,145,718	7,498,880,500		13,300,026,218
370	Kab. Buton	2,001,457,141	3,614,118,008		5,615,575,149
371	Kab. Konawe	6,913,110,566	1,954,557,642		8,867,668,208
372	Kab. Kolaka	9,068	4,158,943,823		4,158,952,891
373	Kab. Muna	857,987,899	3,677,250,294		4,535,238,193
374	Kota Kendari	715,644,150	3,979,001,486		4,694,645,636
375	Kota Bau-bau	808,611,700	4,241,738,406		5,050,350,106
376	Kab. Konawe Selatan	1,461,421,488	18,303,878,911		19,765,300,399

No.	Nama Derah	Dana Bagi Hasil	DNF	Dana Keistimewaan	Total Piutang Transfer ke Daerah
377	Kab. Bombana	6,223,101,305	6,175,164,183		12,398,265,488
378	Kab. Wakatobi	269,550,064	4,525,459,830		4,795,009,894
379	Kab. Kolaka Utara	2,053,726,067	2,939,495,798		4,993,221,865
380	Kab. Konawe Utara	6,627	905,175,883		905,182,510
381	Kab. Buton Utara	7,217	1,469,861,862		1,469,869,079
382	Kab. Konawe Kepulauan	7,382	1,092,086,731		1,092,094,113
383	Kab. Kolaka Timur	325,767,833	1,840,892,604		2,166,660,437
384	Kab. Muna Barat	479,904,611	2,670,628,476		3,150,533,087
385	Kab. Buton Tengah	5,400	4,956,336,534		4,956,341,934
386	Kab. Buton Selatan	348,578,441	3,327,792,277		3,676,370,718
387	Provinsi Bali	8,218,461,997	6,098,041,075		14,316,503,072
388	Kab. Badung	8,516,188,114	5,345,523,386		13,861,711,500
389	Kab. Bangli	1,596,314,188	8,681,431,188		10,277,745,376
390	Kab. Buleleng	2,388,808,784	7,635,127,046		10,023,935,830
391	Kab. Gianyar	1,967,256,816	8,409,982,941		10,377,239,757
392	Kab. Jembrana	1,014,346,916	4,456,899,004		5,471,245,920
393	Kab. Karangasem	2,270,506,251	8,526,308,947		10,796,815,198
394	Kab. Klungkung	1,088,608,185	4,090,877,841		5,179,486,026
395	Kab. Tabanan	1,598,733,435	10,315,683,936		11,914,417,371
396	Kota Denpasar	829,172,705	3,729,045,693		4,558,218,398
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	14,210,928,899	5,173,521,095		19,384,449,994
398	Kab. Bima	6,233,660,493	9,612,618,508		15,846,279,001
399	Kab. Dompu	2,955,684,267	1,882,606,067		4,838,290,334
400	Kab. Lombok Barat	2,586,070,063	4,801,460,334		7,387,530,397
401	Kab. Lombok Tengah	5,711,264,986	6,894,041,958		12,605,306,944
402	Kab. Lombok Timur	2,662,899,933	15,103,197,701		17,766,097,634
403	Kab. Sumbawa	8,130,087,428	16,794,760,076		24,924,847,504
404	Kota Mataram	1,557,158,739	2,790,178,971		4,347,337,710
405	Kota Bima	2,470,959,606	4,873,678,832		7,344,638,438
406	Kab. Sumbawa Barat	7,816	3,832,043,765		3,832,051,581
407	Kab. Lombok Utara	2,017,620,171	2,951,495,351		4,969,115,522
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	8,198,260,548	3,328,313,235		11,526,573,783
409	Kab. Alor	1,975,910,447	15,853,419,193		17,829,329,640
410	Kab. Belu	2,682,245,922	10,635,769,094		13,318,015,016
411	Kab. Ende	3,337,916,384	11,142,542,871		14,480,459,255
412	Kab. Flores Timur	1,993,288,844	6,873,033,711		8,866,322,555
413	Kab. Kupang	3,206,792,055	23,672,773,353		26,879,565,408
414	Kab. Lembata	1,784,050,578	2,652,123,935		4,436,174,513
415	Kab. Manggarai	1,510,461,569	4,629,463,933		6,139,925,502
416	Kab. Ngada	1,504,852,908	4,061,435,183		5,566,288,091
417	Kab. Sikka	1,453,505,095	7,119,494,090		8,572,999,185
418	Kab. Sumba Barat	1,529,163,873	2,307,458,750		3,836,622,623
419	Kab. Sumba Timur	2,653,450,631	17,870,446,593		20,523,897,224
420	Kab. Timor Tengah Selatan	4,682,926,593	19,171,652,112		23,854,578,705
421	Kab. Timor Tengah Utara	3,379,329,992	10,791,631,732		14,170,961,724
422	Kota Kupang	899,514,323	5,847,490,197		6,747,004,520
423	Kab. Rote Ndao	1,468,583,317	3,169,214,645		4,637,797,962
424	Kab. Manggarai Barat	1,203,526,516	8,837,120,072		10,040,646,588
425	Kab. Nagekeo	1,539,745,472	3,912,872,955		5,452,618,427
426	Kab. Sumba Barat Daya	1,983,729,989	9,247,048,185		11,230,778,174
427	Kab. Sumba Tengah	1,689,683,928	2,236,403,942		3,926,087,870
428	Kab. Manggarai Timur	1,630,344,386	8,890,343,640		10,520,688,026
429	Kab. Sabu Raijua	1,279,740,812	3,491,722,264		4,771,463,076
430	Kab. Malaka	1,628,071,819	7,057,567,498		8,685,639,317

No.	Nama Derah	Dana Bagi Hasil	DNF	Dana Keistimewaan	Total Piutang Transfer ke Daerah
431	Provinsi Maluku	28,035,563,364	3,999,523,889		32,035,087,253
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	6,972,933,290	1,962,199,384		8,935,132,674
433	Kab. Maluku Tengah	8,031,677,356	9,969,649,103		18,001,326,459
434	Kab. Maluku Tenggara	3,902,308,905	1,986,922,886		5,889,231,791
435	Kab. Buru	8,732,490,101	1,599,659,666		10,332,149,767
436	Kota Ambon	3,650,728,748	7,205,855,992		10,856,584,740
437	Kab. Seram Bagian Barat	8,678,698,762	10,107,604,815		18,786,303,577
438	Kab. Seram Bagian Timur	21,051,437,407	4,558,764,437		25,610,201,844
439	Kab. Kepulauan Aru	4,577,146,930	8,996,805,440		13,573,952,370
440	Kota Tual	3,181,565,587	2,472,568,450		5,654,134,037
441	Kab. Maluku Barat Daya	7,111,451,366	7,901,663,311		15,013,114,677
442	Kab. Buru Selatan	8,785,011,119	245,307,959		9,030,319,078
443	Provinsi Papua	326,409,983,824	2,391,202,300		328,801,186,124
444	Kab. Biak Numfor	23,573,432,666	2,186,375,421		25,759,808,087
445	Kab. Jayapura	24,319,779,604	2,454,914,069		26,774,693,673
446	Kab. Jayawijaya	25,252,988,342	2,682,165,207		27,935,153,549
447	Kab. Merauke	27,404,210,435	7,196,097,995		34,600,308,430
448	Kab. Mimika	813,842,483,603	1,315,271,981		815,157,755,584
449	Kab. Nabire	28,882,241,482	5,212,102,311		34,094,343,793
450	Kab. Paniai	27,141,073,007	3,243,091,213		30,384,164,220
451	Kab. Puncak Jaya	27,880,185,810	698,619,520		28,578,805,330
452	Kab. Kepulauan Yapen	20,565,609,510	1,789,096,309		22,354,705,819
453	Kota Jayapura	12,158,159,011	1,823,837,284		13,981,996,295
454	Kab. Sarmi	29,143,118,968	172,502,220		29,315,621,188
455	Kab. Keerom	30,281,489,033	5,158,843,738		35,440,332,771
456	Kab. Yahukimo	29,372,100,586	579,834,080		29,951,934,666
457	Kab. Pegunungan Bintang	29,646,329,935	1,329,513,440		30,975,843,375
458	Kab. Tolikara	19,926,416,104	5,367,586,215		25,294,002,319
459	Kab. Boven Digoel	23,143,268,222	6,522,108,972		29,665,377,194
460	Kab. Mappi	21,716,741,151	7,310,941,657		29,027,682,808
461	Kab. Asmat	20,700,783,460	14,250,781,465		34,951,564,925
462	Kab. Waropen	26,670,687,037	265,411,214		26,936,098,251
463	Kab. Supiori	21,071,379,393	765,162,500		21,836,541,893
464	Kab. Mamberamo Raya	51,538,726,088	6,490,722		51,545,216,810
465	Kab. Mamberamo Tengah	19,916,066,944	8,457,088,288		28,373,155,232
466	Kab. Yalimo	19,081,838,755	3,233,650,337		22,315,489,092
467	Kab. Lanny Jaya	19,327,289,888	1,649,300,179		20,976,590,067
468	Kab. Nduga	15,212,737,843	2,662,372,988		17,875,110,831
469	Kab. Dogiyai	18,553,121,344	572,534,672		19,125,656,016
470	Kab. Puncak	17,360,686,078	862,616,487		18,223,302,565
471	Kab. Intan Jaya	18,972,688,030	2,250,593,149		21,223,281,179
472	Kab. Deiyai	18,487,176,559	372,108,664		18,859,285,223
473	Provinsi Maluku Utara	6,430,522,902	1,698,836,620		8,129,359,522
474	Kab. Halmahera Tengah	9,056	2,581,792,300		2,581,801,356
475	Kota Ternate	7,245,027,670	3,563,851,620		10,808,879,290
476	Kab. Halmahera Barat	2,602,402,846	3,284,608,479		5,887,011,325
477	Kab. Halmahera Timur	10,350	2,809,199,069		2,809,209,419
478	Kab. Halmahera Selatan	7,981	6,355,606,819		6,355,614,800
479	Kab. Halmahera Utara	53,777,491,736	3,743,386,011		57,520,877,747
480	Kab. Kepulauan Sula	9,911	1,676,541,941		1,676,551,852
481	Kota Tidore Kepulauan	883,192,519	4,091,514,242		4,974,706,761
482	Kab. Pulau Morotai	8,782	5,227,324,760		5,227,333,542
483	Kab. Pulau Taliabu	8,731	1,965,952,573		1,965,961,304
484	Provinsi Banten	8,279	6,745,042,165		6,745,050,444

No.	Nama Derah	Dana Bagi Hasil	DNF	Dana Keistimewaan	Total Piutang Transfer ke Daerah
485	Kab. Lebak	4,167,738,389	9,334,406,003		13,502,144,392
486	Kab. Pandeglang	12,323,764,472	31,278,639,645		43,602,404,117
487	Kab. Serang	3,634,037,208	11,729,272,801		15,363,310,009
488	Kab. Tangerang	6,927	12,006,032,401		12,006,039,328
489	Kota Cilegon	589,627,463	3,618,428,842		4,208,056,305
490	Kota Tangerang	9,400	10,555,703,507		10,555,712,907
491	Kota Serang	1,202,598,880	7,776,744,819		8,979,343,699
492	Kota Tangerang Selatan	8,726	3,808,290,007		3,808,298,733
493	Provinsi Bangka Belitung	145,569,597,845	1,775,895,109		147,345,492,954
494	Kab. Bangka	109,662,313,847	6,287,970,245		115,950,284,092
495	Kab. Belitung	45,695,636,523	3,045,815,365		48,741,451,888
496	Kota Pangkal Pinang	29,286,598,850	3,326,735,704		32,613,334,554
497	Kab. Bangka Selatan	13,649,581,740	3,841,615,415		17,491,197,155
498	Kab. Bangka Tengah	72,591,146,893	2,268,323,600		74,859,470,493
499	Kab. Bangka Barat	43,015,776,732	7,284,215,876		50,299,992,608
500	Kab. Belitung Timur	60,219,006,586	4,340,457,547		64,559,464,133
501	Provinsi Gorontalo	3,530,619,189	3,965,401,039		7,496,020,228
502	Kab. Boalemo	1,497,056,704	3,394,984,561		4,892,041,265
503	Kab. Gorontalo	1,773,605,419	9,463,803,709		11,237,409,128
504	Kota Gorontalo	936,527,839	4,276,011,386		5,212,539,225
505	Kab. Pohuwato	2,960,557,235	4,589,416,711		7,549,973,946
506	Kab. Bone Bolango	2,543,287,854	7,502,057,544		10,045,345,398
507	Kab. Gorontalo Utara	3,371,922,387	4,145,423,378		7,517,345,765
508	Provinsi Kepulauan Riau	20,165,653,978	618,662,403		20,784,316,381
509	Kab. Natuna	6,100,003,170	6,928,197,801		13,028,200,971
510	Kab. Kepulauan Anambas	10,342,807,050	2,189,987,833		12,532,794,883
511	Kab. Karimun	4,425,786,985	6,733,360,717		11,159,147,702
512	Kota Batam	1,835,774,086	5,708,104,362		7,543,878,448
513	Kota Tanjung Pinang	6,417,684,815	5,450,926,492		11,868,611,307
514	Kab. Lingga	4,405,170,963	2,665,184,893		7,070,355,856
515	Kab. Bintan	8,252,290,549	5,829,479,555		14,081,770,104
516	Provinsi Papua Barat	3,544	6,611,152,800		6,611,156,344
517	Kab. Fak Fak	4,226,716,815	1,204,072,415		5,430,789,230
518	Kab. Manokwari	11,075,758,024	4,943,431,583		16,019,189,607
519	Kab. Sorong	27,701,661,680	4,696,942,664		32,398,604,344
520	Kota Sorong	7,726,004,291	1,904,695,640		9,630,699,931
521	Kab. Raja Ampat	9,214	8,498,834,151		8,498,843,365
522	Kab. Sorong Selatan	1,838,456,479	1,563,212,732		3,401,669,211
523	Kab. Teluk Bintuni	6,615	5,269,233,727		5,269,240,342
524	Kab. Teluk Wondama	9,971	2,008,884,742		2,008,894,713
525	Kab. Kaimana	11,541	3,016,163,526		3,016,175,067
526	Kab. Maybrat	8,239	556,983,080		556,991,319
527	Kab. Tambrauw	8,438	527,356,447		527,364,885
528	Kab. Manokwari Selatan	2,268,754,950	287,412,784		2,556,167,734
529	Kab. Pegunungan Arfak	5,782	33,127,986,282		33,127,992,064
530	Provinsi Sulawesi Barat	2,011,825,208	2,713,375,363		4,725,200,571
531	Kab. Majene	1,345,555,777	2,484,431,369		3,829,987,146
532	Kab. Mamuju	1,397,013,432	7,238,533,470		8,635,546,902
533	Kab. Polewali Mandar	1,621,366,634	6,286,059,308		7,907,425,942
534	Kab. Mamasa	2,546,049,136	571,859,491		3,117,908,627
535	Kab. Pasangkayu	2,446,061,081	5,484,602,370		7,930,663,451
536	Kab. Mamuju Tengah	2,520,874,471	2,319,245,717		4,840,120,188
537	Provinsi Kalimantan Utara	23,166,642,441	1,008,538,535		24,175,180,976
538	Kab. Bulungan	13,111	3,249,398,219		3,249,411,330

No.	Nama Derah	Dana Bagi Hasil	DNF	Dana Keistimewaan	Total Piutang Transfer ke Daerah
539	Kab. Malinau	9,506	6,211,310,740		6,211,320,246
540	Kab. Nunukan	13,308,987,632	3,586,234,053		16,895,221,685
541	Kota Tarakan	6,373,035,467	5,688,128,622		12,061,164,089
542	Kab. Tana Tidung	8,218	4,863,703,141		4,863,711,359
543	Provinsi Papua Selatan		-		-
544	Provinsi Papua Tengah		134,595,000		134,595,000
545	Provinsi Papua Pegunungan		-		-
546	Provinsi Papua Barat Daya		132,056,100		132,056,100
Jumlah		**6,370,424,360,396**	**4,103,787,260,228**	**23,842,547,568**	**10,498,054,168,192**

RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN

Uraian	Debitur ATK di PUPN	Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)	Dikelola Kantor Pusat (debitur ATK)	Grand Total	Mutasi	Saldo 31 Desember 2022 (Audited)
JUMLAH	43.279.078.895.965	34.016.836.940.477	25.798.518.429.624	**103.094.434.266.065**	**2.691.387.897.526**	100.403.046.368.539

1. Aset Kredit Yang Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN *

a Asset Transfer Kit (ATK)

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2023	Saldo 31 Desember 2023 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2022 (Audited)	Saldo 31 Desember 2022 nilai konversi
Dollar Amerika (USD)	1.596.942.202	24.655.190.656.084	200.284.670	2.878.506.416.361	1.396.657.532	21.776.684.239.724
Dollar Australia (AUD)	7.721	81.477.265	-	(145.311)	7.721	81.622.576
Dollar Hongkong (HKD)	-	-	-	-	-	-
Dollar Selandia Baru (NZD)	1.785.135	17.485.875.785	-	(124.584.547)	1.785.135	17.610.460.332
Dollar Singapura (SGD)	412.424	4.829.838.645	-	41.485.756	412.424	4.788.352.889
Euro (EUR)	51.100.302	873.117.139.201	-	24.412.658.421	51.100.302	848.704.480.780
Gulden Belanda (NLG)	195.945	1.519.251.165	-	42.478.790	195.945	1.476.772.375
Italian Lira (ITL)	777.963.520	6.865.028.746	-	191.948.588	777.963.520	6.673.080.158
Mark Jerman (DEM)	1.562.424	13.649.500.674	-	381.644.779	1.562.424	13.267.855.895
Poundsterling (GBP)	349.627	6.881.761.332	-	305.220.438	349.627	6.576.540.894
Rupiah (IDR)	14.257.382.288.592	14.257.382.288.592	1.843.862.211.637	1.843.862.211.637	12.413.520.076.954	12.413.520.076.954
Yen Jepang (JPY)	5.708.440.804	623.395.986.392	-	(49.948.286.187)	5.708.440.804	673.344.272.579
Jumlah	**14.265.521.048.695**	**40.460.398.803.883**	**1.844.062.496.307**	**4.697.671.048.726**	**12.421.458.552.388**	**35.762.727.755.157**

b Non Asset Transfer Kit (Non ATK) telah PB/PJPN

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2023	Saldo 31 Desember 2023 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2022 (Audited)	Saldo 31 Desember 2022 nilai konversi
Dollar Amerika (USD)	90.523.651	1.397.594.648.098	40.500.000	617.625.881.394	50.023.651	779.968.766.704
Dollar Australia (AUD)	-	-	-	-	-	-
Dollar Hongkong (HKD)	-	-	-	-	-	-
Dollar Selandia Baru (NZD)	-	-	-	-	-	-
Dollar Singapura (SGD)	-	-	-	-	-	-
Euro (EUR)	-	-	-	-	-	-
Gulden Belanda (NLG)	-	-	-	-	-	-
Italian Lira (ITL)	-	-	-	-	-	-
Mark Jerman (DEM)	230.000	-	-	-	-	-
Poundsterling (GBP)	-	-	-	-	-	-
Rupiah (IDR)	1.419.076.139.392	1.419.076.139.392	14.130.346.802	14.130.346.802	1.404.945.792.590	1.404.945.792.590
Yen Jepang (JPY)	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**1.419.166.893.043**	**2.816.670.787.490**	**14.170.846.802**	**631.756.228.196**	**1.404.995.816.241**	**2.184.914.559.294**

***Aset kredit Non ATK telah memperhatikan tahap pengurusan yang telah PB/PJPN**

a+b Total

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2023	Saldo 31 Desember 2023 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2022 nilai konversi
Dollar Amerika (USD)	1.687.465.853	26.052.785.304.182	240.784.670	3.496.132.297.755	1.446.681.183	22.556.653.006.428
Dollar Australia (AUD)	7.721	81.477.265	-	(145.311)	7.721	81.622.576
Dollar Hongkong (HKD)	-	-	-	-	-	-
Dollar Selandia Baru (NZD)	1.785.135	17.485.875.785	-	(124.584.547)	1.785.135	17.610.460.332
Dollar Singapura (SGD)	412.424	4.829.838.645	-	41.485.756	412.424	4.788.352.889
Euro (EUR)	51.100.302	873.117.139.201	-	24.412.658.421	51.100.302	848.704.480.780
Gulden Belanda (NLG)	195.945	1.519.251.165	-	42.478.790	195.945	1.476.772.375
Italian Lira (ITL)	777.963.520	6.865.028.746	-	191.948.588	777.963.520	6.673.080.158
Mark Jerman (DEM)	1.792.424	15.658.805.266	-	2.390.949.371	1.562.424	13.267.855.895
Poundsterling (GBP)	349.627	6.881.761.332	-	305.220.438	349.627	6.576.540.894
Rupiah (IDR)	15.676.458.427.984	15.676.458.427.984	1.857.992.558.439	1.857.992.558.439	13.818.465.869.545	13.818.465.869.545
Yen Jepang (JPY)	5.708.440.804	623.395.986.392	-	(49.948.286.187)	5.708.440.804	673.344.272.579
Jumlah	**15.684.687.941.738**	**43.279.078.895.965**	**1.858.233.343.109**	**5.331.436.581.513**	**13.826.454.368.629**	**37.947.642.314.451**

2. Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham

Nama Obligor	Bank Asal	Saldo 31 Desember 2023	Mutasi	Saldo 31 Desember 2022	KPKNL
Dewanto Kurniawan	Bank Deka	-	-	-	KPKNL Jakarta I
Setiawan Harjono, Hendarawan Harjono	Bank Aspac (BBKU)	3.546.957.490.458	- 3.636.363.636	3.550.593.854.094	KPKNL Jakarta I
Hindarto Tantular/Anton Tantular	Bank Central Dagang (BBKU)	1.470.120.709.878	-	1.470.120.709.878	KPKNL Jakarta I
Sjamsul Nursalim	Bank Dewa Rutji (BBKU)	-	-	-	KPKNL Jakarta I
Kaharudin Ongko	Bank Arya Panduartha (BBKU)	359.435.826.604	-	359.435.826.604	KPKNL Jakarta I
Sujanto Gondokusumo	Bank Dharmala (BBKU)	822.254.323.305	-	822.254.323.305	KPKNL Jakarta I
Kwan Benny Ahadi	Bank Orient (BBKU)	142.512.244.912	- 213.275.218	142.725.520.130	KPKNL Jakarta I
Andri Tedjadharma PT Centris Mekar Lestari Prasetyo Utomo Paul Banuara	Bank Centris (BBKU), PT	4.542.284.242.763	3.644.605.688.662	897.678.554.101	KPKNL Jakarta I
Baringin Marulam Hasiholan Panggabean & Joseph Januar	Bank Namura	170.144.000.000	-	170.144.000.000	KPKNL Jakarta II
Trijono Gondokusumo	Bank Putera Surya Perkasa	4.893.525.874.669	-	4.893.525.874.669	KPKNL Jakarta II
Santoso Sumali	Bank Metropolitan	70.460.000.000	-	70.460.000.000	KPKNL Jakarta II
Santoso Sumali	Bank Bahari	401.640.027.273	- 4.774.972.727	406.415.000.000	KPKNL Jakarta II
I.M. Sudiarta/IGD Darmawan	Bank Aken	509.986.363.636	-	509.986.363.636	KPKNL Jakarta II
Fadel Muhammad	Bank Intan	136.430.000.000	-	136.430.000.000	KPKNL Jakarta II
Hengky Wijaya	Bank Tata Internasional	596.794.000.000	-	596.794.000.000	KPKNL Jakarta II
David Nusa Wijaya/Tarunojoyo Nusa	Bank Servitia	4.308.730.000.000	-	4.308.730.000.000	KPKNL Jakarta II
Agus Anwar	Bank Pelita Istismarat	577.675.636.364	-	577.675.636.364	KPKNL Jakarta V
Atang Latief	Bank Indonesia Raya	155.727.000.000	-	155.727.000.000	KPKNL Jakarta V
Marimutu Sinivasan	Bank Putra Multikarsa	790.557.000.000	-	790.557.000.000	KPKNL Jakarta V
Ulung Bursa	Bank Lautan Berlian	304.292.363.636	- 61.272.727.273	365.565.090.909	KPKNL Jakarta V
Lidia Muchtar	Bank Tamara	188.483.118.182	-	188.483.118.182	KPKNL Jakarta V
Samadikun Hartono	Bank Modern	2.301.633.133.695	- 27.272.727.273	2.328.905.860.968	KPKNL Jakarta V
Kaharudin Ongko	Bank Umum Nasional	7.727.193.585.101	- 790.563.636	7.727.984.148.737	KPKNL Jakarta V
Jumlah		**34.016.836.940.477**	**3.546.645.058.899**	**30.470.191.881.578**	

3. **a) Dikelola Kantor Pusat (Debitur ATK)**

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2023	Saldo 31 Desember 2023 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2022 nilai konversi
Rupiah (IDR)	7.677.129.953.121	7.677.129.953.121	(3.421.026.144.882)	(3.421.026.144.882)	11.098.156.098.003	11.098.156.098.003
Dollar Amerika (USD)	933.900.236	14.418.485.736.811	(143.204.047)	(2.375.724.239.048)	1.077.104.283	16.794.209.975.858
Dollar Australia (AUD)	1.483.943	15.659.397.544	132.382	1.371.531.351	1.351.561	14.287.866.193
Dollar Hongkong (HKD)	-	-	(13.048.834)	(26.093.492.013)	13.048.834	26.093.492.013
Dollar Selandia Baru (NZD)	-	-	(252.281)	(2.488.767.202)	252.281	2.488.767.202
Dollar Singapura (SGD)	984.813	11.532.999.312	761.135	8.936.037.602	223.678	2.596.961.710
Euro (EUR)	11.558.839	197.498.253.159	(21.445.241)	(350.653.302.455)	33.004.080	548.151.555.614
Gulden Belanda (NLG)	-	-	(136.642)	(1.029.825.712)	136.642	1.029.825.712
- **Poundsterling (GBP)**	-	-	(188.772)	(3.550.837.187)	188.772	3.550.837.187
Yen Jepang (JPY)	1.009.654.693	110.260.350.404	11.240.949	(7.508.441.342)	998.413.744	117.768.791.746
Krona Swedia (SEK)	-	-	(43.357)	(64.628.528)	43.357	64.628.528
Krone Denmark (DKK)	-	-	(86.826)	(193.917.012)	86.826	193.917.012
Mark Jerman (DEM)	-	-	(115.246)	(978.652.560)	115.246	978.652.560
Franc Perancis (FRF)	-	-	(1.428.156)	(3.616.039.583)	1.428.156	3.616.039.583
Ringgit Malaysia (MYR)	173.080	582.301.698	-	(33.214.052)	173.080	615.515.750
Italian Lira (ITL)	-	-			-	-
Koreksi BPK ATK Hasil Inven		707.275.017.557				707.275.017.557
Jumlah	**7.679.087.708.725**	**23.138.424.009.606**	**(3.421.193.959.818)**	**(6.182.653.932.623)**	**11.100.281.668.543**	**29.321.077.942.229**

b) ATK Lainnya

	Mata Uang	Saldo 31 Desember 2023	Saldo 31 Desember 2023 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi konversi	Saldo 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2022 nilai konversi
Koreksi ATK yang tercatat non ATK	Rupiah	271.003.330.924	271.003.330.924	-		271.003.330.924	271.003.330.924
Koreksi ATK sesuai LHP BPK TA 2012	Rupiah	1.980.529.395.026	1.980.529.395.026	-		1.980.529.395.026	1.980.529.395.026
	Dollar Amerika	26.403.989	407.651.180.767	-	(4.039.810.263)	26.403.989	411.690.991.031
Eraska Tristi	Rupiah	893.182.300	893.182.300	-		893.182.300	893.182.300
PT Teratai Mahkota	Rupiah	17.331.000	17.331.000	-		17.331.000	17.331.000
Total			**2.660.094.420.018**	**-**	**(4.039.810.263)**	**2.252.469.643.239**	**2.664.134.230.281**

Catatan Kurs Penutup ND-258/PB/2021

	Kurs Mata Uang Asing	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Dollar Amerika (USD)	15.439,00	15.592,00
2	Dollar Australia (AUD)	10.553	10.571
3	Dollar Hongkong (HKD)	1.976	2.000
4	Dollar Selandia Baru (NZD)	9.795	9.865
5	Dollar Singapura (SGD)	11.711	11.610
6	Euro (EUR)	17.086	16.609
7	Gulden Belanda (NLG)	7.753	7.537
8	Poundsterling (GBP)	19.683	18.810
9	Rupiah (IDR)	1	1
10	Yen Jepang (JPY)	109	118
11	Deutschmark (DEM)	8.736	8.492
12	Krona Swedia (SEK)	1.546	1.491
13	Krone Denmark (DKK)	2.292	2.233
14	Franc Perancis (FRF) **)	2.605	2.532
15	Ringgit Malaysia (MYR)	3.364	3.556
16	Italian Lira (ITL) ***)	9	9

ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA

	Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN	Dikelola Kantor Pusat	Grand Total (31 Desember 2023)	Mutasi	Grand Total (31 Desember 2022)
TOTAL	**96,097,715,704,312**	**2,552,528,157,673**	**98,650,243,861,985**	(1,410,400,931,357)	**100,060,644,793,342**

1. Debitur Yang Telah Diserahkan Pengurusan Piutang Negaranya kepada PUPN

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2023	Saldo 31 Desember 2023 (Nilai Konversi)	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2022 (Nilai Konversi)
Dollar Amerika	4,018,606,608	62,043,267,425,924	(121,603)	(616,742,849,415)	4,018,728,212	62,660,010,275,339
Dollar Singapore	79,397	929,811,627	-	7,986,589	79,397	921,825,038
Rupiah	34,038,096,753,363	34,038,096,753,363	(29,907,429,604)	(29,907,429,604)	34,068,004,182,967	34,068,004,182,967
Yen Jepang	141,216,723	15,421,713,397	-	(1,235,632,200)	141,216,723	16,657,345,598
Deutchmark	-	-	-	(6,441,170,939)	758,513	6,441,170,939
Jumlah	**34,042,256,656,091.00**	**96,097,715,704,312**	**(29,907,551,207)**	**(654,319,095,569)**	**34,072,164,965,812**	**96,752,034,799,881**

2. Debitur Dikelola Kantor Pusat DJKN c.q. Direktorat PKN

(dalam rupiah)

Nama Debitur	Bank Asal	Mata Uang	Saldo 31 Desember 2023	Saldo 31 Desember 2023 (Nilai Konversi)	Mutasi	Saldo 31 Desember 2022 (Audited)
Dirgantara Indonesia PT (Komitmen Bank Garansi)	BBD (Mandiri)	Rupiah (IDR)	-	-	(1,299,150,000)	1,299,150,000.00
Dirgantara Indonesia PT (Komitmen Bank Garansi)	BBD (Mandiri)	Dollar Amerika (USD)	-	-	-	0.00
Dirgantara Indonesia PT (Komitmen Bank Garansi)	BBD (Mandiri)	Rupiah (IDR)	-	-	(108,990,024)	108,990,024.00
Dirgantara Indonesia PT (Komitmen Bank Garansi)	BBD (Mandiri)	Dollar Amerika (USD)	-	-	-	0.00
Dirgantara Indonesia PT (Komitmen Bank Garansi)	BBD (Mandiri)	Rupiah (IDR)	-	-	(34,584,020,410)	34,584,020,409.75
Dirgantara Indonesia PT (Komitmen Bank Garansi)	BBD (Mandiri)	Dollar Amerika (USD)	-	-	-	-
Dirgantara Indonesia PT (Komitmen Bank Garansi)	BBD (Mandiri)	Rupiah (IDR)	-	-	(69,168,040,820)	69,168,040,820
Dirgantara Indonesia PT (Komitmen Bank Garansi)	BBD (Mandiri)	Dollar Amerika (USD)	-	-	-	-
Dirgantara Indonesia PT (Komitmen Bank Garansi)	BBD (Mandiri)	Rupiah (IDR)	-	-	(62,099,370,000)	62,099,370,000.00
Dirgantara Indonesia PT (Komitmen Bank Garansi)	BBD (Mandiri)	Dollar Amerika (USD)	-	-	-	0.00
Dirgantara Indonesia PT (Demand Loan Normal Biasa)	Mandiri	Rupiah (IDR)	-	-	(30,938,810,689)	30,938,810,688.84
Dirgantara Indonesia PT (Demand Loan Normal Biasa)	Mandiri	Dollar Amerika (USD)	3,572,198	55,151,171,715	3,572,198	0.00
Dirgantara Indonesia PT (Kredit Investasi -Non KUK)	Mandiri	Rupiah (IDR)	-	-	(112,771,449,858)	112,771,449,858.24
Dirgantara Indonesia PT (Kredit Investasi -Non KUK)	Mandiri	Dollar Amerika (USD)	-	-	-	0.00
Dirgantara Indonesia PT (Demand Loan Normal Biasa)	Mandiri	Rupiah (IDR)	-	-	(425,983,823,549)	425,983,823,548.50
Dirgantara Indonesia PT (Demand Loan Normal Biasa)	Mandiri	Dollar Amerika (USD)	39,960,087	616,943,787,670	39,960,087	0.00
Dirgantara Indonesia PT (Komitmen Bank Garansi)	Mandiri	Rupiah (IDR)	-	-	(8,693,911,800)	8,693,911,800.00
Dirgantara Indonesia PT (Komitmen Bank Garansi)	Mandiri	Dollar Amerika (USD)	-	-	-	0.00
Dok & Perkapalan Kodja Bahari PT	Fasilitas Restructuring	Rupiah (IDR)	91,489,249,097	91,489,249,097	-	91,489,249,097.01
Dok & Perkapalan Kodja Bahari PT	Fasilitas Restructuring	Rupiah (IDR)	1,212,685,353,878	1,212,685,353,878	-	1,212,685,353,877.93
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	Rupiah (IDR)	-	-	(26,981,928,648)	26,981,928,647.65
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	Rupiah (IDR)	-	-	(537,678,898,460)	537,678,898,460.47
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	Rupiah (IDR)	-	-	(45,000,000,000)	45,000,000,000.00
PT Tuban Petrochemical Industries*	MCB & MYB	Rupiah (IDR)	479,011,013,892	479,011,013,892	(72,689,752,413)	551,700,766,305.00
Jumlah		**Rupiah (IDR)**	**1,783,229,149,153**	**2,455,280,576,252**	**(1,427,954,614,384)**	**3,211,183,763,536.69**
		Dollar Amerika (USD)	**43,532,286**		**43,532,286**	

*Piutang yang tidak terkonversi berupa denda dan penalti MYB Tuban Petro selama 10 tahun

Group Texmaco (dalam perkara)*

No.	Debitur	Mata Uang	Saldo 31 Desember 2023	Saldo 31 Desember 2023 (Nilai Konversi)	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2022 (Nilai konversi)
1	Jaya Perkasa Engineering, PT	Rupiah	-	-	-	-	-	-
		Dollar Amerika	-	-	-	-	-	-
2	Polysindo Eka Perkasa, PT	Rupiah	-	-	-	-	-	-
		Dollar Amerika	-	-	-	-	-	-
3	Texmaco Jaya, PT	Rupiah	-	-	-	-	-	-
		Dollar Amerika	-	-	-	-	-	-
4	Wastra Indah, PT	Rupiah	-	-	-	-	-	-
5	PT Bina Prima Perdana	Rupiah	-	-	-	-	-	-
		Dollar Amerika	-	-	-	-	-	-
Jumlah				**-**		**-**		**-**

5 Debitur eks kelolaan PT PPA sesuai LHP BPK tahun anggaran 2013

No	Nama debitur	Mata uang	Saldo 31 Desember 2023	Saldo 31 Desember 2022
1	PT Citra Makmur Asia	Rupiah	24,561,586,875	24,561,586,875
2	Abdul Hadi	Rupiah	4,911,933	4,911,933
3	Faridah	Rupiah	2,528,941	2,528,941
4	Haryanto	Rupiah	59,267	59,267
5	Zainal Abidin	Rupiah	252,041	252,041
Junlah			24,569,339,058	24,569,339,057

Debitur Dikembalikan ke Kantor Pusat

NO	KODE DEBITUR	NAMA	Mata Uang	Saldo31 Desember 2023	Saldo 31 Desember 2023 (Nilai Konversi)	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2022 (Audited)
1	03.02.00.00002021	GHAZIE AGUSNAN	Rupiah	11,813,746	11,813,746	-	-	11,813,746
2	03.02.00.00002148	PT. ADHIKARA DHARMA	Rupiah	39,340,455,507	39,340,455,507	-	-	39,340,455,507
3	03.02.00.00002225	BPR NUSAMBA BANGUNTAPAN	Rupiah	250,000,000	250,000,000	-	-	250,000,000
4	03.02.00.00002226	BPR NUSAMBA TEMON	Rupiah	200,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000
5	03.02.00.00002264	PT. INDOKUNING FAJAR INDUSTRI	Rupiah	9,037,798,096	9,037,798,096	-	-	9,037,798,096
6	03.02.00.00002275	PT. SUPER DINAMIKA	Rupiah	5,811,023,048	5,811,023,048	-	-	5,811,023,048
7	03.02.00.00002281	CV. ARROZAQ RIENJAYA qq. PT. ASRI SUMBER LANCAR	Dollar Amerika	1,167,637	18,027,151,966	-	(178,648,504)	1,167,637
JUMLAH				54,652,258,034	72,678,242,363	-		54,652,258,034

Catatan Kurs Penutup JISDOR

No.	Kurs Mata Uang Asing	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Dollar Amerika (USD)	15,439.00	15,592.00
2	Dollar Australia (AUD)	10,552.56	10,571.38
3	Dollar Hongkong (HKD)	1,976.08	1,999.68
4	Dollar Selandia Baru (NZD)	9,795.27	9,865.06
5	Dollar Singapura (SGD)	11,710.85	11,610.26
6	Euro (EUR)	17,086.34	16,608.60
7	Gulden Belanda (NLG)	7,753.44	7,536.65
8	Poundsterling (GBP)	19,683.18	18,810.19
9	Rupiah (IDR)	1.00	1.00
10	Yen Jepang (JPY)	109.21	117.96
11	Deutschmark (DEM)	8,736.11	8,491.84
12	Krona Swedia (SEK)	1,545.96	1,490.62
13	Krone Denmark (DKK)	2,292.35	2,233.39
14	Franc Perancis (FRF) **)	2,604.80	2,531.96
15	Ringgit Malaysia (MYR)	3,364.35	3,556.25
16	Italian Lira (ITL) ***)	8.82	8.58

PIUTANG EKS BDL

No.	ASAL BANK BDL	Jumlah Hak Tagih Atau Saldo Awal	Setoran Kas Ke Rekg. BUN. 502.000000980			Total Pengembalian s.d. 2023	Saldo Hak Tagih 2023
			Pengembalian s.d Desember 2006	Pengembalian Periode Tahun 2007 s.d. 2022	Pengembalian Periode s.d TA 2023 Unaudited		
1	2	3	4	5	6	7 = Jumlah 4 s.d. 6	8 = 3 - 7
	BDL eks Dana Talangan						
1	PT. Bank Anrico	210,080,728,375.73	9,532,957,340.07	63,002,518,549.78	646,723,175.00	73,182,199,064.85	136,898,529,310.88
2	PT. Bank Guna Internasional	251,055,008,000.00	183,555,008,000.00	55,752,658,518.21	2,755,602,134.00	242,063,268,652.21	8,991,739,347.79
3	PT. Bank Harapan Sentosa	3,866,182,312,852.07	585,728,056,499.00	107,729,783,541.52	660,541,839.00	694,118,381,879.52	3,172,063,930,972.55
4	PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal	201,802,166,935.30	25,098,188,837.19	9,082,437,189.00	1,129,431,818.00	35,310,057,844.19	166,492,109,091.11
5	PT. Bank Kosagraha Semesta Sejahtera	201,812,614,291.48	46,872,202,071.00	54,029,669,050.83	30,636,365.00	100,932,507,486.83	100,880,106,804.65
6	PT. Bank Mataram Dhanarta	336,763,209,866.98	31,186,000,000.00	10,099,486,567.00	-	41,285,486,567.00	295,477,723,299.98
7	PT. Bank Pasific	2,133,366,434,839.63	332,023,076,267.80	316,732,802,794.96	1,773,978,276.00	650,529,857,338.76	1,482,836,577,500.87
8	PT. Sejahtera Bank Umum	1,687,349,515,372.53	857,387,217,393.65	389,087,160,093.15	71,718,270,365.00	1,318,192,647,851.80	369,156,867,520.73
9	PT. South East Asia Bank	899,399,023,305.99	99,302,719,380.89	102,264,315,664.79	-	201,567,035,045.68	697,831,988,260.31
10	PT. Bank Dwipa Semesta	110,105,997,130.87	6,970,134,600.00	28,025,558,872.00	-	34,995,693,472.00	75,110,303,658.87
11	PT. Astria Raya Bank	578,918,260,698.77	131,949,603,600.00	117,849,064,015.42	36,597,272,750.00	286,395,940,365.42	292,522,320,333.35
12	PT. Bank Pinaesaan	681,084,490,919.58	18,456,680,100.11	50,121,064,816.52	147,481,535.00	68,725,226,451.63	612,359,264,467.95
13	PT. Bank Jakarta	210,994,000,000.00	120,959,930,061.67	90,034,069,938.00	-	210,993,999,999.67	0.33
14	PT. Bank Industri	511,470,229,326.68	279,124,000,000.00	85,244,385,912.00	278,679,623.00	364,647,065,535.00	146,823,163,791.68
15	PT. Bank Umum Majapahit Jaya	8,554,789,642.67	2,500,000,000.00	0.00	-	2,500,000,000.00	6,054,789,642.67
	Total BDL Eks Dana Talangan	**11,888,938,781,558.30**	**2,730,645,774,151.38**	**1,479,054,975,523.18**	**115,738,617,880.00**	**4,325,439,367,554.56**	**7,563,499,414,003.72**

No.	ASAL BANK BDL	Jumlah Hak Tagih Atau Saldo Awal	Setoran kas ke Rekening			Total Pengembalian s.d. 2023	Saldo Hak Tagih 2023
			Pengembalian s.d Desember 2006	Pengembalian Periode Tahun 2007 s.d. 2022	Pengembalian Periode s.d TA 2023 Unaudited		
1	2	3				7 = Jumlah 4 s.d. 6	8 = 3 - 7
	BDL eks Dana Penjaminan						
1	PT Bank Asiatic	886,579,224,443.83	5,000,000,000.00	84,535,687,898.00		89,731,677,428.00	796,847,547,015.83
2	PT Bank Dagang Bali	1,331,516,911,477.24	-	508,541,063,375.00	7,107,035,763.00	517,855,871,478.00	813,661,039,999.24
3	PT Bank Global Internasional	804,234,270,395.51	-	365,066,709,326.00	12,999,037,504.42	379,856,849,432.42	424,377,420,963.09
4	PT Bank Ratu	71,817,985,352.00	-	71,817,985,352.00		71,817,985,352.00	0.00
5	PT Bank Prasidha Utama	227,134,559,144.00	4,000,000,000.00	16,898,914,545.52		20,898,914,545.52	206,235,644,598.48
	Total BDL Eks Dana Penjaminan	**3,321,282,950,812.58**	**9,000,000,000.00**	**1,046,860,360,496.52**	**20,106,073,267.42**	**1,080,161,298,235.94**	**2,241,121,652,576.64**

TOTAL SALDO PIUTANG BDL	**15,210,221,732,370.90**	**IUTANG EKS BANK DALAM LIKUIDASI**	**135,844,691,147.42**	**5,405,600,665,790.50**	**9,804,621,066,580.36**

PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH 2023

No	Uraian		Formula Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			Keterangan
				Saldo 30 Juni 2023	Nilai Agunan/Recovery Rate	Jumlah Penyisihan	
1	**Aset kredit eks BPPN**						
	a.	**Selain Tagihan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham**	Saldo piutang 30 September 2023 - (Saldo piutang 30 Juni2023 x Recovery Rate)	69,077,597,325,589		63,197,707,717,536	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/KMK.6/2014
	b.	**Tagihan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham**	100% x (Saldo piutang 30 September 2023 - nilai agunan)	34,016,836,940,477	1,123,633,401,310	28,776,226,691,467	
2	**Aset kredit eks kelolaan PT PPA**		Saldo piutang 30 September 2023 - (Saldo piutang 30 September 2023 x Recovery Rate)	98,677,140,901,181		99,049,256,806,586	
3	**Aset kredit yang diserahkelolakan kepada PT PPA**		Saldo piutang 30 September 2023 - (Saldo piutang 30 September 2023 x Recovery Rate)	-	-	-	
4	**Piutang eks BDL**		100% x (Saldo piutang 30 September 2023 - nilai agunan)	9,804,621,066,580	949,304,297,559	8,855,316,769,021	Peraturan Menteri Keuangan No.69/PMK.06/2014
5	**Piutang pada PT PPA**		5‰ x (saldo piutang 30 September 2023)	-	-	-	
Jumlah				**211,576,196,233,827**	**2,072,937,698,869**	**199,878,507,984,609**	

ASET INVENTARIS EKS BPPN

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2022		Mutasi Tahun 2023		Saldo 31 Desember 2023	
		Jumlah	Nilai Wajar	Jumlah	Nilai Wajar	Jumlah	Nilai Wajar
1	**Aset Inventaris**	**11,579**	**5,666,304,672**	**(1,341)**	**(367,783,199)**	**10,238**	**5,298,521,473**
	a. Digunakan Instansi	9,719	5,177,353,353	(43)	(19,466,000)	9,676	5,157,887,353
	b. Tidak Digunakan *(idle)*	1,860	488,951,319	(1,298)	(348,317,199)	562	140,634,120

JUMLAH DAN NILAI ASET PROPERTI EKS BPPN

No.	KOREKSI	Saldo Per 31 Desember 2022		Mutasi		Saldo Per 31 Desember 2023	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
1	BJDA (Verifikasi 2011)	919	1.192.788.793.218	(15)	743.109.620.918	904	1.935.898.414.136
2	Temuan BPK	367	837.608.185.869	(3)	41.694.293.000	364	879.302.478.869
3	BJDA (verifikasi 2009)	63	793.477.003.000	(1)	(569.276.858.000)	62	224.200.145.000
4	Settlement	1	12.126.872.000	(1)	(12.126.872.000)	-	-
5	Apartemen Menara 7 Gading	-	-	-	-	-	-
	Sinar Bonana	42	139.208.400.000	-	-	42	139.208.400.000
6	Griya Potensa	2	295.000.000	-	-	2	295.000.000
7	Covernote	86	361.465.913.037	-	39.522.330.000	86	400.988.243.037
	Jumlah	**1.480**	**3.336.970.167.124**	**(20)**	**242.922.513.918**	**1.460**	**3.579.892.681.042**

BJDA (Verifikasi 2011)

NO	BANK	KATEGORI	PROVINSI	KOTA	ALAMAT OBJECT	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	JENIS SERTIFIKAT	Nilai	Dok
1	BIRA	RUMAH	JAWA BARAT	BOGOR	JL. CENDERAWASIH RT 4 RW 06 NO. 32 DS. CIPAYUNG	1.670	471	SHM	571.512.000	1
2	DAGANG INDUSTRI	TANAH	DKI JAKARTA	JAKARTA TIMUR	KEL.KALI SARI KEC. PASAR REBO JAKTIM (JL. KAMPUNG KALI SARI RT 007/02)	955	300	SHM	418.000.000	1
3	BUN	GEDUNG	SUMATERA UTARA	MEDAN	JL. SIDODADI, DS. GEDONG JOHOR	3.978	1.400	SHGB	10.799.498.000	1
4	DANAMON	RUMAH	LAMPUNG	PRINGSEWU	JL. WISMA RINI PRINGSEWU LAMPUNG SELATAN	1.263	1.200	SHM	71.850.000	1
5	DANAMON	RUMAH	LAMPUNG	PRINGSEWU	JL. SUDIRMAN NO.21/40 PRINGSEWU LAMPUNG SELATAN	1.046	1.000	SHM	71.500.000	2
6	BDNI	TANAH	JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. TANAH JAJAR TUNGGAL KEC. KARANG PILANG	3.705	-	SHM	-	1
7	PESONA	RUMAH	SUMATERA UTARA	MEDAN	JL. PEKUBURAN KEL PETISAH TENGAH KEC.MEDAN BARAT, MEDAN	524	-	SHGB	1.323.006.485	1
8	DANAMON	RUMAH	JAWA BARAT	BANDUNG	JL. SUKARNO HATTA GG. H AKWIN KEL KOPO	362		SHM	40.000.000	1
9	SUBENTRA	RUKO	JAKARTA	JAKARTA PUSAT	JL. INDUSTRI RAYA NO. 3 (D/A. JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO. 8 BLOK B 10, GUNUNG SAHARI UTARA	68	-	HGB	2.871.000.000	1
10	TATA	TANAH	JAKARTA	KARAWANG	DS TEGAL LEGA , TELUK JAMBE - KARAWANG	4.255	-	SHM	-	1
11	TATA	TANAH	JAKARTA	KARAWANG	DS TEGAL LEGA , TELUK JAMBE - KARAWANG	3.560	-	SHM	640.800.000	1
12	TATA	TANAH	JAKARTA	KARAWANG	DS TEGAL LEGA , TELUK JAMBE - KARAWANG	1.075	-	SHM	193.500.000	1
13	TATA	TANAH	JAKARTA	KARAWANG	TEGALEGA KEC. TELUK JAMBE KARAWANG	5.145	-	SHM	874.650.000	1
14	TATA	TANAH	JAKARTA	KARAWANG	TEGALEGA KEC. TELUK JAMBE KARAWANG	4.715	-	SHM	848.700.000	1
15	TATA	TANAH	JAKARTA	KARAWANG	TEGALEGA KEC. TELUK JAMBE KARAWANG	3.695	-	SHM	665.100.000	1
16	TATA	TANAH	JAKARTA	KARAWANG	TEGALEGA KEC. TELUK JAMBE KARAWANG	1.875	-	SHM	337.500.000	1
17	TATA	TANAH	JAKARTA	KARAWANG	TEGALEGA KEC. TELUK JAMBE KARAWANG	4.100	-	SHM	738.000.000	1
18	TATA	TANAH	JAKARTA	KARAWANG	TEGALEGA KEC. TELUK JAMBE KARAWANG	15.150	-	SHM	3.030.000.000	1
19	TATA	TANAH	JAKARTA	KARAWANG	TEGALEGA KEC. TELUK JAMBE KARAWANG	1.940	-	SHM	-	1
20	TATA	TANAH	JAKARTA	KARAWANG	TEGALEGA KEC. TELUK JAMBE KARAWANG	840	-	SHM	160.200.000	1
21	TATA	TANAH	JAKARTA	KARAWANG	TEGALEGA KEC. TELUK JAMBE KARAWANG	2.210	-	SHM	-	1
22	PESONA	PABRIK	BANDUNG	BANDUNG	JL. LEUWI GAJAH NO.153, DS BATUJAJAR CIMAHI BANDUNG	14.370	5.597	SHM	5.000.000.000	3
23	BUN	RUMAH	JAKARTA	JAKARTA SELATAN	JL. VETERAN NO. 28 RT 003/06, KEL. BINTARO, KEC. KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN	881	322	SHM	50.000.000	1
24	PESONA	RUMAH	MAKASSAR	MAKASSAR	JL. URIP SUMOHARJO NO. 55B DESA PANAIKANG KEC. PANKUKANG, UJUNG PANDANG	412	-	SHM	204.464.067	1
25	DUTA	HOTEL	DENPASAR	DENPASAR	JL. LEGIAN NO. 188 KUTA BADUNG BALI	2.400	3.713	SHM	3.394.654.801	1

NO	BANK	KATEGORI	PROVINSI	KOTA	ALAMAT OBJECT	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	JENIS SERTIFIKAT	Nilai	Dok
26	PAPAN	TANAH	BANDAR LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	JL. KELAPA KEL SEPANG JAYA KEC KEDATON BANDAR LAMPUNG (JL. KAVLINGAN)	400	-	SHM	75.700.000	1
27	ASPAC	TANAH	JAKARTA	KARAWANG	JL. RAYA PANGKALAN KM 14 DESA WANAJAYA RT06/03	199.105	-	OTHER	37.638.209.236	37
28	ASPAC	RUMAH	JAWA BARAT	CIREBON	PERUM. PILANG PERDANA ESTATE CEREBON	120	45	SHGB	16.828.000	1
29	BUN	TANAH	SUMATERA UTARA	MEDAN	DESA SIBAGANDING	10.202	-	SHM	58.750.000	1
30	TIARA	PABRIK	JAWA BARAT	BANDUNG	JL. PERSATUAN NO. 68, MELONG	1.129	800	SHM	340.925.000	2
31	JAYA	TANAH	BANTEN	TANGERANG	ALAMAT DAFTAR NOMINATIF : GRAHA BINTARO, ALAMAT HASIL CEK FISIK 2010 : BLOK GR19/03, GR03/86, GR24/10, GR24/20, E10/1, E10/03, E10/07, E10/17, E10/17, E10/19, E1023, E10/25, E10/27, G04/07, E10/1, E10/03, E10/07, F03/16, HE03/18, HE03/19, HE04/01, HE04/02, HE05/01, HE05/02, HF01/14, HF02/01, HF01/02, HF02/28, HF02/29, GR21/81, PONDOK KACANG BARAT	4.292	-	HGB	2.062.992.484	29
32	BALI	PABRIK	BANTEN	TANGERANG	JL.GEMBOR RAYA DESA PASIR JAYA,JATIUWUNG	23.125	5.016	HGB & SHM	91.548.928.000	2
33	DUTA	GEDUNG	BANTEN	TANGERANG	JL. DAAN MOGOT NO. 50	650		n/a	-	1
34	BDNI	RUMAH	JAWA TENGAH	SEMARANG	JL. TEUKU UMAR NO.27,KEL KARANGREJO KEC. SEMARANG SELATAN	4.871	NA	SHM	-	1
35	BDNI	RUKO	DKI JAKARTA	JAKARTA BARAT	JL. KH MOH. MANSYUR NO.240 B TAMBORA	113	200	HGB	5.059.300.000	1
36	BDNI	TANAH	JAWA TENGAH	REMBANG	DESA TANJUNGAN KRAGAN	10.880	-	AJB	1.455.200.000	7
37	DAGANG INDUSTRI	TANAH	JAWA BARAT	BANDUNG	PERUMAHAN VILA BUKIT MAS TAHAP II JL. BOJONG KONENG DS. CIBEUNYING KEC. CIMENYAN	15.887	-	HGB	1.500.933.521	1
38	BUN	TANAH	JAWA BARAT	SUMEDANG	BLOK KARYA BHAKTI DESA SUKAJADI WADO, SUMEDANG	23.157	-	SHM	2.227.060.000	4
39	BDNI	TANAH	BANTEN	SERANG	DESA SAWAH LUHUR, KEC. KASEMEN	4.240	-	SHM	212.000.000	1
40	BDNI	TANAH	BANTEN	SERANG	DESA SAWAH LUHUR, KEC. KASEMEN	7.115	-	SHM	355.750.000	1
41	BDNI	TANAH	BANTEN	SERANG	DESA SAWAH LUHUR, KEC. KASEMEN	20.450	-	SHM	2.045.000.000	1
42	PAPAN	RUMAH	JAWA TENGAH	YOGYAKARTA	JL. BINTARAN KULON NO. 6A KEL. WIROGUNAN KEC MERGANGSAN	355	278	SHGB	565.182.344	1
43	PAPAN	RUMAH	JAWA TENGAH	YOGYAKARTA	JL.SULTAN AGUNG NO. 6, KEL. WIROGUNAN KEC. MERGANGSAN	399	228	SHGB	402.911.851	1
44	TATA	TANAH	BANTEN	PANDEGLANG	BLOK CIKUJANG, DS. TANJUNG JAYA, KEC.PANIMBANGAN	19.400	-	SHM	4.609.949.317	1
45	TATA	TANAH	BANTEN	PANDEGLANG	BLOK CIKUJANG, DS. TANJUNG JAYA, KEC.PANIMBANGAN	19.500	-	SHM	253.500.000	1
46	DHARMALA	RUKO	JAWA BARAT	BEKASI	KOMP. RUKO BUMI SATRIA KENCANA KAV. C-3 KAYURINGIN JAYA BEKASI, JA-BAR	170	191	SHGB	300.000.000	1

NO	BANK	KATEGORI	PROVINSI	KOTA	ALAMAT OBJECT	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	JENIS SERTIFIKAT	Nilai	Dok
47	SERVITIA	GEDUNG	BANTEN	TANGERANG	JL. KEMBANG INDAH III G3 NO. 1, KEL. PURI INDAH	200	-	HGB	325.954.417	1
48	BIRA	RUMAH	JAWA BARAT	BANDUNG	JL. MUNDINGLAYA NO. 11 RT 005/04 BANDUNG DS. BALUBUR	442	400	SHM	698.513.966	1
49	NIAGA	GEDUNG	JAWA TIMUR	MALANG	TOKO "OEN", JL. BASUKI RAHMAT 5	1.350	842	HGB	934.850.000	1
50	DAGANG INDUSTRI	RUKO	DKI JAKARTA	JAKARTA TIMUR	JL. RAYA KALIBATA NO. 4 C RT 009 / 05 KEL. CAWANG KEC. KRAMAT JATI	154	172	SHM	396.000.000	1
51	LAUTAN BERLIAN	RUMAH	DKI JAKARTA	JAKARTA BARAT	JL. DR. SUSILO IV NO. 19 KEL GROGOL, KEC PETAMBURAN	275	200	HGB	407.574.066	1
52	BDNI	RUMAH	JAWA BARAT	BANDUNG	JL. VANDEVENTER NO. 5 KEBON PISANG, SUMUR BATU	220	86	SHM	5.678.200.000	1
53	UNIBANK	RUMAH	DKI JAKARTA	JAKARTA UTARA	JL. PLUIT UTARA IV NO.10 BLOK J KAV.18 RT/RW 003/05, PLUIT	220	-	HGB	105.416.667	1
54	SERVITIA	RUKO	SUMATERA UTARA	MEDAN	JL.PANCUR BATU NO.1A DAN 1,MEDAN	214	571	SHGB	194.029.316	1
55	BDNI	TANAH	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR	JL.AP.PETTARANI PANAKUKKANG MAKASSAR	3.966	-	HGB	1.939.734.672	1
56	DANAMON	TANAH	SUMATERA SELATAN	PALEMBANG	JL. PALEMBANG-SEKAYU KM-14 PALEMBANG	6.160		SHM	41.130.000	1
57	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM, NAGA ASRI, JL. NUSA INDAH BLOK A NO. 3, 4 , 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB, SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	6.999.177.000	1
58	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM NAGA ASRI JL.NUSA INDAH BLOK B-3;4;5;6;7;8;11;12;13; KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	7.540.654.000	1
59	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM NAGA ASRI JL.NUSA INDAH BLOK D-7;8;9;10; KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	3.189.122.000	1
60	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM NAGA ASRI JL.NUSA INDAH BLOK E-4;5;6;7;8; KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	3.631.934.000	1
61	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM NAGA ASRI JL.NUSA INDAH BLOK F-2;3;4;5;6;7;8;9;10;11 , KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	7.662.719.000	1
62	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM NAGA ASRI JL.NUSA INDAH BLOK H-11;12;13;16;17;18; KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	3.202.654.000	1
63	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM NAGA ASRI JL.NUSA INDAH BLOK I -11;12;13;14;15;25; KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	2.833.695.000	1
64	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM NAGA ASRI JL.NUSA INDAH BLOK J -3 S/D J-20, KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	7.662.222.000	1
65	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM NAGA ASRI JL.NUSA INDAH BLOK K-4 & K-5; KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB, SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	1.158.240.000	1

NO	BANK	KATEGORI	PROVINSI	KOTA	ALAMAT OBJECT	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	JENIS SERTIFIKAT	Nilai	Dok
66	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM NAGA ASRI JL.NUSA INDAH BLOK L-5;8;9;11;12;13;14 , KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	5.606.446.000	1
67	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM. NAGA ASRI, JL.NUSA INDAH BLOK H25, KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	118	-	SHGB	931.366.000	1
68	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM. NAGA ASRI, JL.NUSA INDAH BLOK H26, KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	118	-	SHGB	595.881.000	1
69	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM NAGA ASRI, JL NUSA INDAH BLOK H-27, KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	118	-	SHGB	548.043.000	1
70	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM. NAGA ASRI, JL. NUSA INDAH BLOK H-2, KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	118	-	SHGB	614.675.000	1
71	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM. NAGA ASRI, JL. NUSA INDAH BLOK H-5, KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	118	-	SHGB	669.670.000	1
72	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM. NAGA ASRI, JL. NUSA INDAH BLOK I-1, KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	684.017.000	1
73	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM NAGA ASRI JL.NUSA INDAH BLOK I - 2;3;4;5;6;7; KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB, SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	4.390.978.000	1
74	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM NAGA ASRI JL.NUSA INDAH BLOK I - 17;18;19;20;21;22;23;24; KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB, SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	4.057.737.000	1
75	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM NAGA ASRI JL.NUSA INDAH BLOK K-3; KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	881.485.000	1
76	MASHILL	RUMAH	DKI JAKARTA	JAKARTA PUSAT	JL. HOS COKROAMINOTO NO. 67 A, JAKARTA PUSAT	272	102	HGB	892.200.000	1
77	DEWARUTJI	GEDUNG	DKI JAKARTA	JAKARTA SELATAN	JL. S. PARMAN, JAKARTA	2.945	7.080	HGB	24.215.002.546	2
78	BALI	GEDUNG	DKI JAKARTA	JAKARTA BARAT	JL.PINANGSIA TIMUR NO.22 B	162	356	HGB	779.440.000	1
79	BALI	RUMAH	DKI JAKARTA	JAKARTA BARAT	JL.SWADARMA RAYA NO.34 SRENGSENG	145	209	SHM	168.225.000	1
80	TIARA	RUKO	DKI JAKARTA	JAKARTA PUSAT	JL. FACHRUDIN NO. 55, TANAH ABANG	85	480	HGB	1.700.000.000	1
81	UNIBANK	RUMAH	DKI JAKARTA	JAKARTA SELATAN	JL. CILANDAK KKO NO.52	1.935	-	SHM	34.880.762.000	2
82	BCA	TANAH	JAWA TIMUR	MALANG	LINGKUNGAN III, KEC. KLOJEN, MALANG	5.680		SHM	184.528.079	1
83	BNN	RUMAH	DKI JAKARTA	JAKARTA BARAT	JL. PENGAIRAN (ADHI KARYA) NO. 24 KEDOYA SELATAN - KEBON JERUK	593	200	SHM	437.915.200	1
84	SERVITIA	RUKO	SUMATERA UTARA	MEDAN	JL.PANCUR BATU NO.1 A SIDODADI MEDAN TIMUR	115	243	HGB	1.253.827.000	1

NO	BANK	KATEGORI	PROVINSI	KOTA	ALAMAT OBJECT	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	JENIS SERTIFIKAT	Nilai	Dok
85	DHARMALA	PABRIK	BANTEN	TANGERANG	DESA KUTA JAYA, KEC. PASAR KEMIS, KAB. TANGERANG	46.540	-	SHM	10.473.230.000	9
86	TAMARA	GEDUNG	DKI JAKARTA	JAKARTA BARAT	KOMP RUKO KOTA GROGOL PERMAI BLOK A 5-6, JL. LATUMENTEN NO. 19	150	498	HGB	4.580.857.000	1
87	CENTRAL DAGANG	RUKO	DKI JAKARTA	JAKARTA BARAT	KOMPL. RUKO KOTA GROGOL PERMAI BLOK B/10, JL. LATUMENTEN NO. 19	74	-	HGB	345.000.000	1
88	BNN	TANAH	SUMATERA BARAT	PARIAMAN	KASANG TENGAH, BATANG ANAI, PD. PARIAMAN	24.965		SHM	87.377.500	1
89	BNN	RUMAH	DKI JAKARTA	JAKARTA BARAT	JL. MESJID ASSURUR GG. P1 (P - SATU) NO. 36 RT. 01 / 01, KEBUN JERUK	190	54	SHM	31.643.816	1
90	HASTIN	RUKO	BANTEN	TANGERANG	JL. PASAR KEMIS	23.775	99	HGB	285.000.000	1
91	PAPAN	RUMAH	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR	JL.SYEH YUSUF BLOK A1 NO 9	1.449	-	SHM	-	1
92	PAPAN	RUMAH	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR	BLOK A4 NO 4	233	63	SHM	-	1
93	PAPAN	RUMAH	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR	BLOK D8 NO 10	108	63	SHM	46.503.967	1
94	MASHILL	TANAH	DKI JAKARTA	JAKARTA BARAT	JL. POS PENGUMBEN RAYA RT.06/03, KEL. SRENGSENG, KEMBANGAN	4.950	-	SHM	2.741.910.463	1
95	NIAGA	TANAH	JAWA BARAT	BANDUNG	DESA BOJONG MALAKA DAN ANDIR	167.427		SHM	2.021.000.000	17
96	POS NUSANTARA	RUMAH	DKI JAKARTA	JAKARTA SELATAN	JL. KRAMAT BATU NO. 7 RT. 02 / 05 - FATMAWATI , CILANDAK, GANDARIA SELATAN	298	150	SHM	108.665.000	1
97	CENTRAL DAGANG	TANAH	DKI JAKARTA	JAKARTA UTARA	MUARA BARU, PENJARINGAN	13.970	-	HGB	21.833.236.934	1
98	SUBENTRA	TANAH	SUMATERA UTARA	MEDAN	JL. TEUKU CIK DITIRO NO. 108 MADRAS HULU	3.295	-	HGB	3.707.827.258	2
99	UPPINDO	TANAH	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR	JL. URIP SUMAHARJO, KEL. PAMPANG, KEC. PANAKUKKANG, UJUNG PANDANG	6.504	-	SHM	1.449.090.945	1
100	ASPAC	TANAH	BALI	BADUNG	JL.BATUBELIG, GEROBOKAN KUTA BADUNG	10.600	-	SHM	263.940.000.000	1
101	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D11, SURABAYA	68	-	SHGB	-	1
102	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D12, SURABAYA	68	-	SHGB	-	1
103	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D16, SURABAYA	68	-	SHGB	-	1
104	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D17, SURABAYA	68	-	SHGB	-	1
105	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D15, SURABAYA	68	-	SHGB	-	1
106	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D18, SURABAYA	68	-	SHGB	-	1
107	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D19, SURABAYA	68	-	SHGB	-	1
108	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D20, SURABAYA	68	-	SHGB	-	1
109	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D21, SURABAYA	68	-	SHGB	-	1
110	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D51, SURABAYA	68	-	SHGB	-	1
111	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D52, SURABAYA	68	-	SHGB	-	1
112	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D53, SURABAYA	68	-	SHGB	-	1
113	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D55, SURABAYA	68	-	SHGB	-	1

NO	BANK	KATEGORI	PROVINSI	KOTA	ALAMAT OBJECT	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	JENIS SERTIFIKAT	Nilai	Dok
114	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D56, SURABAYA	68	-	SHGB	-	1
115	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D57, SURABAYA	68	-	SHGB	-	1
116	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D58, SURABAYA	68	-	SHGB	-	1
117	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D59, SURABAYA	68	-	SHGB	-	1
118	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D60, SURABAYA	68	-	SHGB	-	1
119	BUN	RUMAH	DKI JAKARTA	JAKARTA TIMUR	JL. PEGANGSAAN II NO. 98 - KEL. PEGANGSAAN, JAKARTA	1.673	-	GIRIK	996.550.000	2
120	BUN	RUMAH	JAWA TIMUR	SIDOARJO	JL. HANGTUAH RAYA NO. 31, SIDOKLUMPUK, SIDOARJO	1.639	-	SHGB	528.819.000	1
121	ASPAC	RUMAH	JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. PATEMON BARAT NO. 95A, KEL. KUPANG KRAJAN, KEC. SAWAHAN, SURABAYA	234	294	SHGB	82.600.000	1
122	BNN	RUMAH	BALI	BADUNG	JL. DAHLIA NO. 22, KEL. TONJA	590	134	SHM	275.691.100	1
123	NIAGA	RUMAH	DKI JAKARTA	JAKARTA SELATAN	JL.INTAN UJUNG, CILANDAK	900	278	HM	548.000.000	1
124	UPPINDO	RUMAH	DKI JAKARTA	JAKARTA PUSAT	JL. CIMAHI NO. 10, MENTENG, JAKARTA PUSAT	691	445	HGB	1.500.000.000	1
125	BUN	GEDUNG	SUMATERA UTARA	MEDAN	JL.INDUSTRI NO. 71, DS. T. MORAWA	63.517	50.884	SHGB dan SHM	53.989.450.000	9
126	TAMARA	TANAH	DKI JAKARTA	JAKARTA BARAT	PERUMAHAN T.KEBUN JERUK BLOK T JAK-BAR	57.859		HGB	602.227.045.000	1
127	BUN	RUMAH	JAWA TENGAH	SLEMAN	JL. PALAGAN REJODANI, DS. SARIHARDJO, KEC. NGAGLIK, SLEMAN, YOGYAKARTA	1.496	NA	SHM	168.000.000	1
128	LAUTAN BERLIAN	TANAH	DKI JAKARTA	JAKARTA TIMUR	Billy dan Moon Park Kampung Tipar Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur	64.551	Surat Penyerahan Hak (SPH)		82.237.974.000	41
129	LAUTAN BERLIAN	TANAH	BANTEN	SERANG	Desa Sukadalem Kecamatan Kramat Watu (sekarang Kecamatan Waringin Kurung) Kabupaten Serang	775.315		SHGB	143.754.254.000	27
130	LAUTAN BERLIAN	TANAH	LAMPUNG	LAMPUNG TENGAH	Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Tengah	145.030		SHM	1.740.360.000	2
131	BIRA	TANAH	BANTEN	TANGERANG	Desa Bojong dan Budi Mulya Tangerang	858.408		Girik	37.000.000.000	583
132	BIRA	GEDUNG	BANTEN	TANGERANG	Plaza Shinta, Jalan Teuku Umar, Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten	34.753	19208	SHM dan SHGB	343.241.566.000	2
133	BNN		BALI	GIANYAR	Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali	5.150		SHM	10.840.750.000	1
134	Bank Nasional Komersil (d/h Bank Perniagaan)	Tanah	Jawa Timur	Surabaya	Kelurahan Peneleh, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Prov Jawa Timur	111		SHM	75.000.000	1
135	Bank Umum Nasional	Tanah	Jakarta	Jakarta Utara	Jalan Pluit Karang Molek IX Nomor 11 Blok B.II Kaveling Nomor 11, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta	187		SHGB	275.000.000	1
136	Bank Perniagaan	Tanah	Sulawesi Selatan	Makassar	Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	1.099		SHM	71.435.000	1
137	PT. Overseas Express Bank	Gedung	SUMATERA UTARA	MEDAN	Jl. Pemuda No. 18, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.	782	2.205	SHGB	20.197.032.452	2

NO	BANK	KATEGORI	PROVINSI	KOTA	ALAMAT OBJECT	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	JENIS SERTIFIKAT	Nilai	Dok
138	PT Continental Bank (Bank Dana Asia)	Ruko	SUMATERA UTARA	MEDAN	Jalan Medan-Binjai, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	60	180	SHGB	1.225.133.000	1
139	PT. Bank Dagang Nasional Indonesia	Villa	JAWA BARAT	KABUPATEN BOGOR	Jl. Sirna Galih No. 3 RT 2 RW 1, Desa Megamendung, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat, MEGAMENDUNG	2.093	141	SHGB	2.145.338.667	1
						2.014.465	**73.769**	**-**	**1.935.898.414.136**	**904**

TEMUAN BPK

No	NO. REGISTER	ALAMAT	KAB/KOTA	PROVINSI	DOK	JUMLAH DOK	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	NILAI WAJAR
1	03.01.02.00000843	Meunasah Blang	ACEH UTARA	DISTA ACEH	SHM	1	1.508	0	39.800.000
2	03.01.02.00000845	Polonia	MEDAN	SUMATERA UTARA	SHGB	1	876	0	15.405.920.000
3	03.01.02.00000846	Jl. Kebon Sirih	PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	SHM	1	972	0	503.200.000
4	03.01.02.00000847	Jalan HM.Saleh	PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	SHM	1	117.845	0	57.737.900.000
5	03.01.02.00000848	Jalan Kartini,Pringsewu	LAMPUNG SELATAN	LAMPUNG	SHM	1	679	0	631.700.000
6	03.01.02.00000849	Lemb. 3 Kt. E/5, Tanjungkarang, Tanjungkarang-Telukbetung, Telukbetung Utara, Sumur Batu	BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG	SHM	1	12.544	0	9.865.000.000
7	03.01.02.00000850	Jl. Haji Salim RT/RW 008/06	JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	SHM	1	500	0	1.185.600.000
8	03.01.02.00000851	Guntur	JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	SHM	1	330	0	3.203.700.000
9	03.01.02.00000852	Gg. Buntuk (Kp.Rambutan)	JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	Hak Pakai	1	119	0	181.200.000
10	03.01.02.00000853	Jalan H Murtadho Gang VI	JAKARTA PUSAT	DKI JAKARTA	SHM	1	225	0	691.800.000
11	03.01.02.00000854	Kalideres Village Kav Blok C 6 persil No.18	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	189	0	674.600.000
12	03.01.02.00000855	Komp.Kali Deres Permai Blok G 1 No.12	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	299	0	1.067.200.000
13	03.01.02.00000856	Komp.Kalideres Permai Blok C 8 No.1	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	430	0	1.534.700.000
14	03.01.02.00000857	Komp.Kalideres Permai Blok G 1 No.1	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	299	0	1.067.200.000
15	03.01.02.00000858	Kalideres Permai Village PT Duta Anggada Blok B 4	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	1.033	0	2.069.200.000
16	03.01.02.00000859	Kalideres Permai Village PT Duta Anggada Blok B 4	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	913	0	2.327.600.000
17	03.01.02.00000860	Kalideres Village Blok C 6 Kav No.11	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	236	0	842.300.000
18	03.01.02.00000861	Kalideres Village Blok C 8 Kav No.12	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	256	0	913.700.000
19	03.01.02.00000862	Kalideres Village Blok H.5 No.8	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	179	0	638.908.000
20	03.01.02.00000863	Komp Kali Deres Permai Blok G4 Kav.No.7	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	145	0	773.460.000
21	03.01.02.00000864	Komp Kali Deres Permai Blok H 3 Kav.No.10	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	179	0	781.100.000
22	03.01.02.00000865	Komp Kalideres Permai	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	237	0	820.000.000
23	03.01.02.00000866	Komp Kalideres Permai	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	1.281	0	3.499.000.000
24	03.01.02.00000867	Komp Kalideres Village Blok H 3 Kav No.6	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	165	0	588.900.000
25	03.01.02.00000868	Komp Kalideres Village Blok H 5 Kav No.1	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	143	0	510.400.000
26	03.01.02.00000869	Komp Kalideres Village Blok H.3 Kav No.1	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	179	0	638.900.000
27	03.01.02.00000870	Komp Kalideres Village Blok H.5 Kav. No 9	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	179	0	809.540.000
28	03.01.02.00000871	Komp Perum Kalideres Permai Blok G 2 No.11	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	150	0	677.600.000
29	03.01.02.00000872	-	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHM	1	150	0	227.500.000
30	03.01.02.00000873	Jalan Semanan	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHM	1	1.203	0	1.563.900.000

No	NO. REGISTER	ALAMAT	KAB/KOTA	PROVINSI	DOK	JUMLAH DOK	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	NILAI WAJAR
31	03.01.02.00000874	Jalan Daan Mogot II No. 23	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	88	0	1.237.500.000
32	03.01.02.00000875	Tomang Barat Blok P Kaveling Nomor 460	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHM	1	180	0	753.423.000
33	03.01.02.00000876	Meruya Udik	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHM	1	4.924		738.600.000
34	03.01.02.00000877	Jln.Utan Jati-Perumahan Citra 2 blok. I/6	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	8.295	0	20.768.600.000
35	03.01.02.00000878	Perumahan Citra 2 Blok. I/6	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	1.015	0	2.541.300.000
36	03.01.02.00000879	PEGADUNGAN RT.005/011	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHM	1	600	0	604.800.000
37	03.01.02.00000880	Perkavelingan Dep.Hankam.Blok.L.1.Kav.no.18	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	272	0	686.900.000
38	03.01.02.00000881	Jalan Nuh no 43 Rt 005/05	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	Hak Pakai	1	400	0	1.200.000.000
39	03.01.02.00000882	Kemanggisan Pulo RT 02/RW 11	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHM	1	305		1.235.790.000
40	03.01.02.00000883	Kampung Malaka RT 009/05	JAKARTA UTARA	DKI JAKARTA	SHM	1	1.625	0	896.900.000
41	03.01.02.00000884	-	JAKARTA UTARA	DKI JAKARTA	SHGB	1	67	0	1.389.000.000
42	03.01.02.00000885	Jalan Bumi Asih V Blok A No.6 Kav.22 Perum. Bumi Karang Indah	JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	SHGB	1	180	134	1.028.380.000
43	03.01.02.00000886	-	JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	SHGB	1	1.560	0	17.670.600.000
44	03.01.02.00000887	-	JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	SHGB	1	4.727	0	41.156.300.000
45	03.01.02.00000888	Jl. Swadarma Raya No.58	JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	SHM	1	1.320	0	4.279.800.000
46	03.01.02.00000889	Jalan Komp. Tanjung Barat Indah Blok. O Kav. No.11	JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	SHGB	1	210	0	1.236.580.000
47	03.01.02.00000890	Gang Eddy III/9 Rt 014/06	JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	Girik	1	215	0	1.843.600.000
48	03.01.02.00000891	Jl. Tebet Dalam I.J RT 004/01	JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	SHGB	1	140	0	1.312.400.000
49	03.01.02.00000892	Komplek Perumahan Bukit Permai Cibubur Jalan O. RT/RW 004/11	JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	SHGB	1	300	0	1.014.000.000
50	03.01.02.00000893	Kel. Pondok Kelapa Blok C2 No. 4	JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	SHGB	1	220	0	1.070.300.000
51	03.01.02.00000894	PERKAV PERMATA TIMUR JLN. CURUG RT 002/08	JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	SHGB	1	312	0	2.841.200.000
52	03.01.02.00000895	PERKAV PERMATA TIMUR JLN. CURUG RT 002/08	JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	SHGB	1	212	0	
53	03.01.02.00000896	PERKAV PERMATA TIMUR JLN. CURUG RT 002/08	JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	SHGB	1	316	0	
54	03.01.02.00000897	PERKAV PERMATA TIMUR JLN. CURUG RT 002/08	JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	SHGB	1	128	0	
55	03.01.02.00000898	Jl. Mundu III No. 3 RT. 012/04	JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	SHGB	1	722	0	1.467.100.000
56	03.01.02.00000899	Komp. Pertamina Blok U, Kav. No. 475 dan No. 476 Jl. Jl. Mundu II No. 4, RT. 0012/04 Blok H, Persil 474+476	JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	SHGB	1	362	0	2.073.100.000
57	03.01.02.00000900	Jl Ir.H.Juanda II, No.5.A	JAKARTA PUSAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	304	0	1.517.000.000
58	03.01.02.00000901	Jl. Stasiun Senen No. 60A	JAKARTA PUSAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	115	0	628.000.000
59	03.01.02.00000902	JalanPatrice Lumuba	JAKARTA PUSAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	123	0	2.658.000.000

No	NO. REGISTER	ALAMAT	KAB/KOTA	PROVINSI	DOK	JUMLAH DOK	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	NILAI WAJAR
60	03.01.02.00000903	JALAN BAMBU BETUNG I NO. 10	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	150	0	414.200.000
61	03.01.02.00000904	Perumahan Citra Garden 2 Blok I.1 No.16	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	90	0	1.050.000.000
62	03.01.02.00000905	-	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHM	1	2.715	0	4.472.900.000
63	03.01.02.00000906	Jl. Madu No.4A RT 005/03	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	382	0	2.727.150.000
64	03.01.02.00000907	Jl. Pinangsia I No.14 Rt 012/Rw 05	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	32	0	432.400.000
65	03.01.02.00000908	Jalan Kelapa Molek VII Blok NI No.17	JAKARTA UTARA	DKI JAKARTA	SHGB	1	90	0	595.900.000
66	03.01.02.00000909	Jl Pademangan Timur No. 7 Blok C Rt 0014/01	JAKARTA UTARA	DKI JAKARTA	SHGB	1	141	0	934.180.000
67	03.01.02.00000910	Desa Sunter Jaya	JAKARTA UTARA	DKI JAKARTA	SHGB	1	78	0	1.735.100.000
68	03.01.02.00000911	Pasar Regional Jatinegara	JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	SIPTB	1	-	9,12	487.100.000
69	03.01.02.00000912	Rusun Taman Kemayoran Condominium Lt.VIII Blok.C Blok A.I	JAKARTA PUSAT	DKI JAKARTA	SHMSRS	1	-	90	516.000.000
70	03.01.02.00000913	Tower Bougenville	JAKARTA PUSAT	DKI JAKARTA	SHMSRS	1	-	90,14	508.700.000
71	03.01.02.00000914	Pasar Regional Tanah Abang Blok A, Lantai L01, Los CKS, No. 016	JAKARTA PUSAT	DKI JAKARTA	SIPTB	1	-	4,14	960.300.000
72	03.01.02.00000915	Blok C lantai dasar Pasar Grogol	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	Lainnya (Non Tanah dan/atau Bangunan)	1	-	0	36.000.000
73	03.01.02.00000916	Jl. Taman Sari VIII/90 RT/RW 006/06	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SIPTB	1	-	4	750.000.000
74	03.01.02.00000917	Desa Sorongan	PANDEGLANG	BANTEN	SHM	1	20.000	0	7.259.700.000
75	03.01.02.00000918	Desa Sorongan	PANDEGLANG	BANTEN	SHM	1	20.000	0	
76	03.01.02.00000919	Blok : Pamatang Jenggot	PANDEGLANG	BANTEN	SHM	1	20.000	0	
77	03.01.02.00000920	Blok Pamatang Jenggot	PANDEGLANG	BANTEN	SHM	1	20.000	0	
78	03.01.02.00000921	Blok Pamatang Jenggot	PANDEGLANG	BANTEN	SHM	1	20.000	0	
79	03.01.02.00000922	Blok Pamatang Jenggot	PANDEGLANG	BANTEN	SHM	1	20.000	0	
80	03.01.02.00000923	Blok Pematang Jenggot	PANDEGLANG	BANTEN	SHM	1	20.000	0	
81	03.01.02.00000924	Desa Sorongan	PANDEGLANG	BANTEN	SHM	1	20.000	0	
82	03.01.02.00000925	Sorongan Rt.000 rw.00	PANDEGLANG	BANTEN	SHM	1	20.000	0	
83	03.01.02.00000926	Pagelaran	PANDEGLANG	BANTEN	SHM	1	157	0	2.200.000
84	03.01.02.00000927	Pagelaran	PANDEGLANG	BANTEN	SHM	1	10.490	0	743.200.000
85	03.01.02.00000928	Pandeglang	PANDEGLANG	BANTEN	SHM	1	14.293	0	644.400.000
86	03.01.02.00000929	Cimangeunteung	LEBAK	BANTEN	SHM	1	10.830	0	315.400.000
87	03.01.02.00000930	Cimangeunteung	LEBAK	BANTEN	SHM	1	14.665	0	
88	03.01.02.00000931	Cimangeunteung	LEBAK	BANTEN	SHM	1	2.405	0	
89	03.01.02.00000932	Cimangeunteung	LEBAK	BANTEN	SHM	1	6.840	0	

No	NO. REGISTER	ALAMAT	KAB/KOTA	PROVINSI	DOK	JUMLAH DOK	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	NILAI WAJAR
90	03.01.02.00000933	Cimangeunteung	LEBAK	BANTEN	SHM	1	3.154	0	
91	03.01.02.00000934	Cimangeunteung	LEBAK	BANTEN	SHM	1	4.405	0	
92	03.01.02.00000935	Cimangeunteung	LEBAK	BANTEN	SHM	1	4.750	0	
93	03.01.02.00000936	Cimangeunteung	LEBAK	BANTEN	SHM	1	3.265	0	
94	03.01.02.00000937	Cimangeunteung	LEBAK	BANTEN	SHM	1	8.280	0	
95	03.01.02.00000938	Cimangeunteung	LEBAK	BANTEN	SHM	1	9.105	0	
96	03.01.02.00000939	Cimangeunteung	LEBAK	BANTEN	SHM	1	19.320	0	
97	03.01.02.00000940	Cimangeunteung	LEBAK	BANTEN	SHM	1	12.250	0	
98	03.01.02.00000941	-	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHM	1	1.560	0	278.000.000
99	03.01.02.00000942	Cipayung	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHM	1	280		268.200.000
100	03.01.02.00000943	RT VIII/5	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHGB	1	8.112	0	9.543.700.000
101	03.01.02.00000944	KEDAUNG	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHM	1	58		52.700.000
102	03.01.02.00000945	Desa Wanakerta	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHM	1	5.955	0	483.000.000
103	03.01.02.00000946	desa Wanakerta	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHM	1	4.014	0	311.500.000
104	03.01.02.00000947	pengarengan	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHM	1	3.585	0	170.100.000
105	03.01.02.00000948	Gaga	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHM	1	2.130	0	962.800.000
106	03.01.02.00000949	Kiarapayung	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHM	1	1.840	0	4.404.100.000
107	03.01.02.00000950	Kiarapayung	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHM	1	5.210	0	
108	03.01.02.00000951	Kiarapayung	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHM	1	2.685	0	
109	03.01.02.00000952	Desa Karang Suraga	SERANG	BANTEN	SHGB	1	110.387	0	5.640.800.000
110	03.01.02.00000953	Desa Karang Suraga	SERANG	BANTEN	SHGB	1	1.810	0	294.600.000
111	03.01.02.00000954	Bulakan	SERANG	BANTEN	SHGB	1	5.901	0	11.840.500.000
112	03.01.02.00000955	Bulakan	SERANG	BANTEN	SHGB	1	3.515	0	
113	03.01.02.00000956	Desa Bulakan	SERANG	BANTEN	SHGB	1	173.366	0	
114	03.01.02.00000957	Bulakan	SERANG	BANTEN	SHGB	1	20.187	0	
115	03.01.02.00000958	Bulakan	SERANG	BANTEN	SHGB	1	110.187	0	
116	03.01.02.00000959	Desa Bulakan	SERANG	BANTEN	SHGB	1	39.678	0	
117	03.01.02.00000960	-	SERANG	BANTEN	SHM	1	14.400	0	2.162.900.000
118	03.01.02.00000961	Pulomerak, Ramanuju	SERANG	BANTEN	SHM	1	92	0	379.100.000
119	03.01.02.00000962	Pulomerak, Ramanuju	SERANG	BANTEN	SHM	1	84	0	519.100.000
120	03.01.02.00000963	Pulomerak, Ramanuju	SERANG	BANTEN	SHM	1	87	0	537.700.000
121	03.01.02.00000964	Pulomerak, Ramanuju	SERANG	BANTEN	SHM	1	91	0	562.400.000

No	NO. REGISTER	ALAMAT	KAB/KOTA	PROVINSI	DOK	JUMLAH DOK	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	NILAI WAJAR
122	03.01.02.00000965	Blok E.3/2	KOTA TANGERANG	BANTEN	SHGB	1	315	0	489.500.000
123	03.01.02.00000966	Blok F.1/52	KOTA TANGERANG	BANTEN	SHGB	1	149	0	378.300.000
124	03.01.02.00000967	Blok F.1/52	KOTA TANGERANG	BANTEN	SHGB	1	92	0	
125	03.01.02.00000968	Blok F.1/71	KOTA TANGERANG	BANTEN	SHGB	1	380	0	771.200.000
126	03.01.02.00000969	Blok F.1/71	KOTA TANGERANG	BANTEN	SHGB	1	130	0	
127	03.01.02.00000970	Kroncong	KOTA TANGERANG	BANTEN	SHGB	1	15.070	0	3.621.900.000
128	03.01.02.00000971	Kroncong	KOTA TANGERANG	BANTEN	SHGB	1	445	0	
129	03.01.02.00000972	Jalan Gading Golf Timur No.89	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHGB	1	1.025	0	4.117.200.000
130	03.01.02.00000973	Pondok Kacang Timur	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHGB	1	91	0	284.100.000
131	03.01.02.00000974	Perumahan Villa Bintaro Regency Blok G No.15	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHGB	1	153	0	306.400.000
132	03.01.02.00000975	Blok DC 8/2	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHGB	1	137	0	695.800.000
133	03.01.02.00000976	-	SERANG	BANTEN	SHGB	1	235	0	9.500.000
134	03.01.02.00000977	Batujaya	KOTA TANGERANG	BANTEN	SHM	1	130	0	168.200.000
135	03.01.02.00000978	Blok: A.5/12	KOTA TANGERANG	BANTEN	SHGB	1	144	70	258.400.000
136	03.01.02.00000979	Bojong Rt.01 Rw.01	KOTA TANGERANG	BANTEN	SHM	1	410	249	662.800.000
137	03.01.02.00000980	Kp. Pulo 004/08	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	Girik	1	2.000	0	236.000.000
138	03.01.02.00000981	Kalisuren	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	3.640	0	364.000.000
139	03.01.02.00000982	Blok 07 desa karadenan	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	Girik	1	1.550	0	145.500.000
140	03.01.02.00000983	Desa Karadenan Blok 007 Rt.01/ Rw.07	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	7.687	0	8.156.500.000
141	03.01.02.00000984	Blok Ciherang	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	1.460	0	292.000.000
142	03.01.02.00000985	Cilember	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	1.624	0	158.700.000
143	03.01.02.00000986	Cilember	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	660	0	69.100.000
144	03.01.02.00000987	Cilember	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	3.410	0	347.000.000
145	03.01.02.00000988	-	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	1.145	0	684.000.000
146	03.01.02.00000989	Cibuluh	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	Girik	1	4.460	0	437.500.000
147	03.01.02.00000990	Kapling Blok K/18	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	671	0	1.207.800.000
148	03.01.02.00000991	Desa Bedahan, Kec. Sawangan	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	1.435	0	215.250.000
149	03.01.02.00000992	-	SUKABUMI	JAWA BARAT	SHM	1	1.600	0	948.600.000
150	03.01.02.00000993	-	SUKABUMI	JAWA BARAT	SHM	1	3.830		
151	03.01.02.00000994	-	SUKABUMI	JAWA BARAT	SHM	1	2.010		
152	03.01.02.00000995	Blok Cipanggulan	SUKABUMI	JAWA BARAT	SHM	1	11.230	0	1.048.600.000
153	03.01.02.00000996	Kertajadi	CIANJUR	JAWA BARAT	SHGB	1	953.485	0	27.343.000.000

No	NO. REGISTER	ALAMAT	KAB/KOTA	PROVINSI	DOK	JUMLAH DOK	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	NILAI WAJAR
154	03.01.02.00000997	Kertajadi	CIANJUR	JAWA BARAT	SHGB	1	551.585		
155	03.01.02.00000998	Kertajadi	CIANJUR	JAWA BARAT	SHGB	1	1.344.025		
156	03.01.02.00000999	Kertajadi	CIANJUR	JAWA BARAT	SHGB	1	1.026.720		
157	03.01.02.00001000	Kertajadi	CIANJUR	JAWA BARAT	SHGB	1	652.490		
158	03.01.02.00001001	Cipendawa	CIANJUR	JAWA BARAT	SHGB	1	104	0	136.700.000
159	03.01.02.00001002	Kav C-6 Nomor 10	CIANJUR	JAWA BARAT	SHGB	1	114	0	133.300.000
160	03.01.02.00001003	VILLA YASMIN	CIANJUR	JAWA BARAT	SHGB	1	56	0	78.500.000
161	03.01.02.00001004	VILLA YASMIN	CIANJUR	JAWA BARAT	SHGB	1	10	0	13.500.000
162	03.01.02.00001005	Blok Gunung Batu	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	10.000	0	37.000.000
163	03.01.02.00001006	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.210	0	1.209.000.000
164	03.01.02.00001007	Desa Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.500		
165	03.01.02.00001008	Desa Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.480		
166	03.01.02.00001009	Desa Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	405		
167	03.01.02.00001010	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.730		
168	03.01.02.00001011	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	650		
169	03.01.02.00001012	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.400		
170	03.01.02.00001013	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	2.050		
171	03.01.02.00001014	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.910		
172	03.01.02.00001015	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.870		
173	03.01.02.00001016	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.200		
174	03.01.02.00001017	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.350		
175	03.01.02.00001018	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	2.120		
176	03.01.02.00001019	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	950		
177	03.01.02.00001020	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.520		
178	03.01.02.00001021	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.540		
179	03.01.02.00001022	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	10.800		
180	03.01.02.00001023	Desa Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.315		
181	03.01.02.00001024	Desa Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	2.325		
182	03.01.02.00001025	Desa Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.290		
183	03.01.02.00001026	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	300		
184	03.01.02.00001027	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	550		
185	03.01.02.00001028	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	2.100		

No	NO. REGISTER	ALAMAT	KAB/KOTA	PROVINSI	DOK	JUMLAH DOK	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	NILAI WAJAR
186	03.01.02.00001029	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	2.560		
187	03.01.02.00001030	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.420		
188	03.01.02.00001031	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	800		
189	03.01.02.00001032	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	2.410		
190	03.01.02.00001033	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	980		
191	03.01.02.00001034	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	565		
192	03.01.02.00001035	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	480		
193	03.01.02.00001036	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	720		
194	03.01.02.00001037	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.180		
195	03.01.02.00001038	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.830		
196	03.01.02.00001039	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	2.340		
197	03.01.02.00001040	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.730		
198	03.01.02.00001041	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.760		
199	03.01.02.00001042	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.070		
200	03.01.02.00001043	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	2.650		
201	03.01.02.00001044	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.070		
202	03.01.02.00001045	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.430		
203	03.01.02.00001046	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	3.240		
204	03.01.02.00001047	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	4.030		
205	03.01.02.00001048	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	2.340		
206	03.01.02.00001049	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.010		
207	03.01.02.00001050	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	2.440		
208	03.01.02.00001051	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.010		
209	03.01.02.00001052	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.800	0	465.000.000
210	03.01.02.00001053	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.155		-
211	03.01.02.00001054	Desa Bengle	KARAWANG	JAWA BARAT	SHM	1	2.495	0	3.712.000.000
212	03.01.02.00001055	Desa Bengle	KARAWANG	JAWA BARAT	SHM	1	34.450		
213	03.01.02.00001056	Desa Bengle	KARAWANG	JAWA BARAT	SHM	1	8.390		
214	03.01.02.00001057	Desa Bengle	KARAWANG	JAWA BARAT	SHM	1	16.800		
215	03.01.02.00001058	Desa Bengle	KARAWANG	JAWA BARAT	SHM	1	1.560		
216	03.01.02.00001059	Desa Bengle	KARAWANG	JAWA BARAT	SHM	1	7.280		
217	03.01.02.00001060	Desa Bengle	KARAWANG	JAWA BARAT	SHM	1	17.260		

No	NO. REGISTER	ALAMAT	KAB/KOTA	PROVINSI	DOK	JUMLAH DOK	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	NILAI WAJAR
218	03.01.02.00001061	Desa Bengle	KARAWANG	JAWA BARAT	SHM	1	5.320		
219	03.01.02.00001062	Desa Bengle	KARAWANG	JAWA BARAT	SHM	1	8.560		
220	03.01.02.00001063	Desa Lemah Mulya	KARAWANG	JAWA BARAT	SHM	1	7.810		
221	03.01.02.00001064	Desa Bengle	KARAWANG	JAWA BARAT	SHM	1	2.395		
222	03.01.02.00001065	Klari	KARAWANG	JAWA BARAT	Girik	1	899	0	
223	03.01.02.00001066	Sumur Kondang	KARAWANG	JAWA BARAT	Girik	1	3.445		
224	03.01.02.00001067	Sumur Kondang	KARAWANG	JAWA BARAT	Girik	1	890		
225	03.01.02.00001068	Babakan	KARAWANG	JAWA BARAT	Girik	1	2.180		
226	03.01.02.00001069	Babakan	KARAWANG	JAWA BARAT	Girik	1	900		
227	03.01.02.00001070	Babakan	KARAWANG	JAWA BARAT	Girik	1	795		
228	03.01.02.00001071	Klari	KARAWANG	JAWA BARAT	Girik	1	5.990		
229	03.01.02.00001072	Sumur Kondang	KARAWANG	JAWA BARAT	Girik	1	2.740		
230	03.01.02.00001073	Kampung Jatimulya	KARAWANG	JAWA BARAT	SHM	1	7.830	0	861.000.000
231	03.01.02.00001074	Pahlawan Setia	KABUPATEN BEKASI	JAWA BARAT	SHM	1	8.700	0	1.679.000.000
232	03.01.02.00001075	Desa Telajung	KABUPATEN BEKASI	JAWA BARAT	SHGB	1	4.655	0	1.282.000.000
233	03.01.02.00001076	cikaragem	KABUPATEN BEKASI	JAWA BARAT	SHM	1	978	0	1.350.000.000
234	03.01.02.00001077	Cikaragem	KABUPATEN BEKASI	JAWA BARAT	SHM	1	1.004		
235	03.01.02.00001078	Cikaragem	KABUPATEN BEKASI	JAWA BARAT	SHM	1	2.477		
236	03.01.02.00001079	Cikaragem	KABUPATEN BEKASI	JAWA BARAT	SHM	1	747		
237	03.01.02.00001080	KAYURINGIN JAYA	KABUPATEN BEKASI	JAWA BARAT	SHGB	1	136	0	186.000.000
238	03.01.02.00001082	Katulampa Blok N No.12	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	1.050	0	1.890.000.000
239	03.01.02.00001083	Katulampa Blok N No.15	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	1.119	0	2.014.200.000
240	03.01.02.00001084	Blok I.1 No.5	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	682	0	1.363.200.000
241	03.01.02.00001085	Blok I.1 no.12	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	671	0	1.341.200.000
242	03.01.02.00001086	Blok I.1 No.8	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	682	0	1.363.200.000
243	03.01.02.00001087	Blok I.3 No.17	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	276	0	551.700.000
244	03.01.02.00001088	Blok I.3 No.18	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	282	0	563.700.000
245	03.01.02.00001089	Blok I.3 No.19	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	290	0	579.700.000
246	03.01.02.00001090	Blok I.3 No.20	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	291	0	581.700.000
247	03.01.02.00001091	Blok I.3 No.22	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	291	0	581.700.000
248	03.01.02.00001092	Blok I.3 No.23	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	291	0	581.700.000
249	03.01.02.00001093	Blok I.3 No.23A	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	294	0	587.700.000

No	NO. REGISTER	ALAMAT	KAB/KOTA	PROVINSI	DOK	JUMLAH DOK	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	NILAI WAJAR
250	03.01.02.00001094	Blok I.3 No.25	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	291	0	581.700.000
251	03.01.02.00001095	Blok I.3 No.26	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	294	0	587.700.000
252	03.01.02.00001096	TH XII No.10	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	188	0	375.800.000
253	03.01.02.00001097	TH XII No.11	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	162	0	323.800.000
254	03.01.02.00001098	TH XII No.12	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	167	0	333.800.000
255	03.01.02.00001099	TH XII No.12 A	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	173	0	345.800.000
256	03.01.02.00001100	TH XII No.12 B	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	217	0	433.800.000
257	03.01.02.00001101	TH XII No.8	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	161	0	321.800.000
258	03.01.02.00001102	-	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	340	0	34.000.000
259	03.01.02.00001103	Perumahan Taman Raflesia C-3	KOTA BANDUNG	JAWA BARAT	SHGB	1	155	0	305.700.000
260	03.01.02.00001104	-	KOTA BANDUNG	JAWA BARAT	SHM	1	295	0	590.000.000
261	03.01.02.00001105	Bantar Gebang	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	SHM	1	111	0	222.480.000
262	03.01.02.00001106	Jakasetia	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	SHGB	1	120	0	319.720.000
263	03.01.02.00001107	Kav. No.G-11	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	SHGB	1	250	0	573.680.000
264	03.01.02.00001108	Kav. No.G-7	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	SHGB	1	233	0	514.960.000
265	03.01.02.00001109	Jati Kramat	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	SHGB	1	11.781	0	9.223.000.000
266	03.01.02.00001110	Jatimekar	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	SHM	1	400	0	427.000.000
267	03.01.02.00001111	Kampung Jatiasih	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	SHM	1	600	0	682.000.000
268	03.01.02.00001112	Jatimekar	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	SHM	1	955	0	1.009.000.000
269	03.01.02.00001113	Margahayu	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	SHM	1	900	0	666.000.000
270	03.01.02.00001114	Pengasinan	DEPOK	JAWA BARAT	SHM	1	495	0	67.600.000
271	03.01.02.00001115	-	LEBAK	BANTEN (d/h. JAWA BARAT)	SHGB	1	14.150	0	379.700.000
272	03.01.02.00001116	-	LEBAK	BANTEN (d/h. JAWA BARAT)	SHGB	1	14.150	0	379.700.000
273	03.01.02.00001117	-	LEBAK	BANTEN (d/h. JAWA BARAT)	SHGB	1	14.150	0	379.700.000
274	03.01.02.00001118	-	LEBAK	BANTEN (d/h. JAWA BARAT)	SHGB	1	14.150	0	379.700.000
275	03.01.02.00001119	Kopo	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	185	0	59.500.000
276	03.01.02.00001120	-	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	1.015	0	1.770.580.000
277	03.01.02.00001121	Perumahan Citra Indah Blok D-10, Kav No. 15	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	135	88	145.820.000
278	03.01.02.00001122	Kapling Blok K/28	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	1.097	0	2.743.400.000
279	03.01.02.00001123	Tanah Baru	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	25.020	0	16.573.600.000
280	03.01.02.00001124	KOMPLEK GREEN HILL BLOK D 2 NO. 3	CIANJUR	JAWA BARAT	SHGB	1	638	0	336.200.000
281	03.01.02.00001125	Rengasdengklok Selatan	KARAWANG	JAWA BARAT	SHGB	1	50	0	104.000.000

No	NO. REGISTER	ALAMAT	KAB/KOTA	PROVINSI	DOK	JUMLAH DOK	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	NILAI WAJAR
282	03.01.02.00001126	No. Kav A.9-6	KABUPATEN BEKASI	JAWA BARAT	SHGB	1	85	0	335.000.000
283	03.01.02.00001127	-	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	518	0	733.000.000
284	03.01.02.00001128	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	0	2.487.600.000
285	03.01.02.00001129	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	0	3.991.500.000
286	03.01.02.00001130	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	0	12.840.300.000
287	03.01.02.00001131	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	0	5.554.800.000
288	03.01.02.00001132	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	0	112.500.000
289	03.01.02.00001133	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	0	912.400.000
290	03.01.02.00001134	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	0	228.600.000
291	03.01.02.00001135	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	0	118.800.000
292	03.01.02.00001136	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	0	537.300.000
293	03.01.02.00001137	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	0	135.400.000
294	03.01.02.00001138	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	0	514.800.000
295	03.01.02.00001139	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	0	139.000.000
296	03.01.02.00001140	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	0	632.900.000
297	03.01.02.00001141	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	0	632.900.000
298	03.01.02.00001142	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	0	1.128.200.000
299	03.01.02.00001143	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	0	422.600.000
300	03.01.02.00001144	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	0	295.200.000
301	03.01.02.00001145	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	0	473.000.000
302	03.01.02.00001146	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	0	2.106.000.000
303	03.01.02.00001147	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	33.885	0	118.437.678.000
304	03.01.02.00001148	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	0	62.950.500.000
305	03.01.02.00001149	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	0	4.488.300.000
306	03.01.02.00001150	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	0	2.943.000.000
307	03.01.02.00001151	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	0	819.000.000
308	03.01.02.00001152	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	0	936.900.000
309	03.01.02.00001153	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	0	1.447.200.000
310	03.01.02.00001155	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	0	522.900.000
311	03.01.02.00001156	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	0	545.400.000
312	03.01.02.00001157	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	0	722.700.000
313	03.01.02.00001158	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	0	1.104.300.000

No	NO. REGISTER	ALAMAT	KAB/KOTA	PROVINSI	DOK	JUMLAH DOK	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	NILAI WAJAR
314	03.01.02.00001159	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	0	926.100.000
315	03.01.02.00001160	Katulampa Blok A/6	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	7.846	0	10.592.100.000
316	03.01.02.00001161	Katulampa Blok C.3 No.3	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	18.107	0	27.448.900.000
317	03.01.02.00001162	Blok I.6 No.17	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	259	0	517.700.000
318	03.01.02.00001163	Blok I.3 No.12	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	316	0	631.600.000
319	03.01.02.00001164	Blok I.3 No.3A	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	298	0	595.700.000
320	03.01.02.00001166	Blok I.6 No.18	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	256	0	284.500.000
321	03.01.02.00001167	Blok I.6 No.19	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	235	0	505.700.000
322	03.01.02.00001168	Blok I.6 No.20	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	255	0	503.700.000
323	03.01.02.00001169	Blok I.6 No.21	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	409	0	817.500.000
324	03.01.02.00001170	Blok I.6 No.23	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	252	0	503.700.000
325	03.01.02.00001171	Blok. TH. VII No.5	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	185	0	369.800.000
326	03.01.02.00001172	Blok. TH. VIII No.2	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	185	0	369.800.000
327	03.01.02.00001173	Cihampar	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	129.130	0	51.343.700.000
328	03.01.02.00001174	TH XII No.9	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	202	0	403.800.000
329	03.01.02.00001176	Jakasetia	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	SHGB	1	173	0	493.000.000
330	03.01.02.00001177	Kav. No. L - 3	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	SHGB	1	175	0	416.000.000
331	03.01.02.00001178	Bojong Rawa Lumbu Nomor 149	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	SHM	1	390	105	465.000.000
332	03.01.02.00001179	Desa/Kelurahan Bojong Rawalumbu	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	SHM	1	105	0	
333	03.01.02.00001180	-	DEPOK	JAWA BARAT	SHGB	1	34.100	0	32.705.300.000
334	03.01.02.00001181	Jl. Anjasmoro	KAB. SEMARANG	JAWA TENGAH	SHGB	1	8.348	0	71.635.123.000
335	03.01.02.00001182	Jatingaleh	KAB. SEMARANG	JAWA TENGAH	SHM	1	4.871	0	2.472.032.500
336	03.01.02.00001183	-	MALANG (KAB)	JAWA TIMUR	SHM	1	6.700	0	43.500.000
337	03.01.02.00001184	-	MALANG (KAB)	JAWA TIMUR	SHM	1	6.700	0	
338	03.01.02.00001185	-	MALANG (KAB)	JAWA TIMUR	SHM	1	6.700	0	
339	03.01.02.00001186	-	MALANG (KAB)	JAWA TIMUR	SHM	1	1.470	0	
340	03.01.02.00001187	-	PASURUAN	JAWA TIMUR	SHM	1	2.515	0	679.100.000
341	03.01.02.00001188	Benoa	BADUNG	B A L I	SHM	1	33.150	0	2.984.000.000
342	03.01.02.00001189	Benoa	BADUNG	B A L I	SHM	1	53.100	0	4.779.000.000
343	03.01.02.00001190	Aikmel	LOMBOK TIMUR	NUSA TENGGARA BARAT	SHM	1	3.856	0	11.600.000
344	03.01.02.00001191	Kuala Mandor A	PONTIANAK (KAB)	KALIMANTAN BARAT	SHM	1	120.020	0	512.820.000
345	03.01.02.00001192	Kuala Mandor B	PONTIANAK (KAB)	KALIMANTAN BARAT	SHM	1	170.940	0	2.558.800.000

No	NO. REGISTER	ALAMAT	KAB/KOTA	PROVINSI	DOK	JUMLAH DOK	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	NILAI WAJAR
346	03.01.02.00001193	RT .1 Gunung Ulin	KOTA BARU	KALIMANTAN SELATAN	SHM	1	5.566	0	43.100.000
347	03.01.02.00001194	Pematang Panjang	BANJAR	KALIMANTAN SELATAN	SHM	1	19.998	0	329.100.000
348	03.01.02.00001195	-	KOTA BARU	KALIMANTAN SELATAN	SHM	1	300	0	176.820.000
349	03.01.02.00001196	wanea	MANADO	SULAWESI UTARA	SHM	1	315	0	390.488.000
350	03.01.02.00001197	SUKA SARI PLAZA JL. SILIWANGI NO. 31 RUKO NO. 8 SUKASARI	BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	77	220	231.937.036
351	03.01.02.00001198	JL. RAYA TAMAN CIMANGGU PERIKANAN BOGOR RT 01/05	BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	261	1025	127.459.550
352	03.01.02.00001199	KOMP TMN YASMIN, JL. SEROJA I NO 4	BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	162	96	125.000.000
353	03.01.02.00001200	PERUM BUKIT CIMANGGU BLOK M I NO. 18	BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	380	250	340.806.526
354	03.01.02.00001201	TAMAN BARANANGSIANG INDAH BLOK P3 NO. 2	BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	140	138	119.249.490
355	03.01.02.00001202	PERUM PAKUAN 2 JL. DAHLIA II NO. 11	BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	126	174	320.272.500
356	03.01.02.00001203	VILLA GREEN APPLE GARDEN T-3	CIANJUR	JAWA BARAT	SHGB	1	225	116	211.493.267
357	03.01.02.00001204	PERUM ARCO JL. RAYA ARCO NO. 11 BLOK B24	DEPOK	JAWA BARAT	SHM	1	775	174	118.000.000
358	03.01.02.00001205	Kompek Ruko Merdeka Mall No.3 dan 3A Jl. Merdeka	BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	2	170		3.250.000.000
359	03.01.02.00001206	Komplek Ruko Segitiga Emas Blok B No.18 Jl. A. Tani No.221-223	Bandung	JAWA BARAT	SHGB	1	120		3.137.178.000
360	03.01.02.00001207	Komplek Ruko Depok Mall Blok B3 No.32 Jl. Margonda Raya	DEPOK	JAWA BARAT	SHGB	1	71		2.556.000.000
361	03.01.02.00001208	JL.PENEGAK RT 0010/02 PAL MERIAM MATRAMAN JAKARTA TIMUR	JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	SHGB	1	1498		16.938.800.000
362	03.01.02.00001209		Bekasi	JAWA BARAT	SHM	1	7900		
363	03.01.02.00001210		Bekasi	JAWA BARAT	SHM	1	2010		
								3036	**879.302.478.869**

BJDA (verifikasi 2009)

No	No. Register	Alamat pada Bukti Kepemilikan	Luas (m2)		Nilai Wajar (Rp)	Jumlah dok. kepemilikan
			Tanah	Bangunan		
1	03.01.02.00001211	Jl. Semangka Raya, Grogol Petamburan, Jakbar	357	192	1.925.687.000,00	1
2	03.01.02.00001212	Jl. Lingkar Luar Komp. Greenhill Permata	83	648	688.972.000,00	1
3	03.01.02.00001213	Jl. Letjen S. Parman Tanjung Duren Grogol	3.196		19.120.163.000,00	1
4	03.01.02.00001214	Menteng Jakpus	1.041	205	12.726.398.000,00	1
5	03.01.02.00001215	Jl. KH. Agus Salim Kebon Sirih Menteng	746		7.341.648.000,00	1
6	03.01.02.00001216	Kalideres Jakarta Barat	143		200.343.000,00	1
7	03.01.02.00001217	Kalideres Jakarta Barat	195		267.150.000,00	1
8	03.01.02.00001218	Kalideres Jakarta Barat	87		116.928.000,00	1
9	03.01.02.00001219	Kalideres Jakarta Barat	240		354.960.000,00	1
10	03.01.02.00001220	Kalideres Jakarta Barat	87		116.928.000,00	1
11	03.01.02.00001221	Kalideres Jakarta Barat	179		245.588.000,00	1
12	03.01.02.00001222	Kalideres Jakarta Barat	165		226.380.000,00	1
13	03.01.02.00001223	Kalideres Jakarta Barat	145		207.205.000,00	1
14	03.01.02.00001224	Kalideres Jakarta Barat	143		204.490.000,00	1
15	03.01.02.00001225	Kalideres Jakarta Barat	240		354.960.000,00	1
16	03.01.02.00001226	Jl. Jenderal A. Yani No. 74 Kesawan Medan	443	440	5.657.918.000,00	1
17	03.01.02.00001227	Petisah Tengah, Medan Petisah, Medan, Sumut	581	581	3.705.980.000,00	1
18	03.01.02.00001228	Melawai, Kebayoran Baru, Jaksel	379	300	5.730.910.000,00	1

No	No. Register	Alamat pada Bukti Kepemilikan	Luas (m2)		Nilai Wajar (Rp)	Jumlah dok. kepemilikan
			Tanah	Bangunan		
19	03.01.02.00001229	Jl. Palatahan, Melawai, Kebayoran Baru	379	550	6.612.462.000,00	1
20	03.01.02.00001230	Bukit Duri, Tebet, Jaksel	286	201	2.442.551.000,00	1
21	03.01.02.00001231	Jl. Iskandar Muda Jaksel	283	280	14.005.658.000,00	1
22	03.01.02.00001232	Pejagalan Penjaringan Jakut	74	74	532.892.000,00	1
23	03.01.02.00001233	Desa Tambak Sumur, Batu Jaya, Karawang	45.150		146.573.000,00	1
24	03.01.02.00001234	Desa Tambak Sumur, Batu Jaya, Karawang	15.960		50.820.000,00	1
25	03.01.02.00001235	Desa Tambak Sumur, Batu Jaya, Karawang	40.310		130.861.000,00	1
26	03.01.02.00001236	Desa Tambak Sumur, Batu Jaya, Karawang	14.550		44.437.000,00	1
27	03.01.02.00001237	Desa Tambak Sumur, Batu Jaya, Karawang	15.180		46.361.000,00	1
28	03.01.02.00001238	Desa Tambak Sumur, Batu Jaya, Karawang	18.180		58.057.000,00	1
29	03.01.02.00001239	Desa Tambak Sumur, Batu Jaya, Karawang	28.940		93.346.000,00	1
30	03.01.02.00001240	Desa Tambak Sumur, Batu Jaya, Karawang	65.690		213.253.000,00	1
31	03.01.02.00001241	Desa Tambak Sumur, Batu Jaya, Karawang	22.230		117.962.000,00	1
32	03.01.02.00001242	Desa Tambak Sumur, Batu Jaya, Karawang	9.340		28.525.000,00	1
33	03.01.02.00001243	Kalideres Jakarta Barat	143		166.566.000,00	1
34	03.01.02.00001244	Kalideres Jakarta Barat	179		212.222.000,00	1

No	No. Register	Alamat pada Bukti Kepemilikan	Luas (m2)		Nilai Wajar (Rp)	Jumlah dok. kepemilikan
			Tanah	Bangunan		
35	03.01.02.00001245	Kalideres Jakarta Barat	87		96.361.000,00	1
36	03.01.02.00001246	Kalideres Jakarta Barat	87		96.361.000,00	1
37	03.01.02.00001247	Kalideres Jakarta Barat	87		96.361.000,00	1
38	03.01.02.00001248	Kalideres Jakarta Barat	768		998.400.000,00	1
39	03.01.02.00001249	Kalideres Jakarta Barat	318		386.529.000,00	1
40	03.01.02.00001250	Kalideres Jakarta Barat	258		309.239.000,00	1
41	03.01.02.00001251	Kalideres Jakarta Barat	254		304.444.000,00	1
42	03.01.02.00001252	Kalideres Jakarta Barat	151	160	395.204.000,00	1
43	03.01.02.00001253	Kalideres Jakarta Barat	250		319.150.000,00	1
44	03.01.02.00001254	Kalideres Jakarta Barat	471		624.546.000,00	1
45	03.01.02.00001255	Kalideres Jakarta Barat	220		266.552.000,00	1
46	03.01.02.00001256	Kalideres Jakarta Barat	240		300.144.000,00	1
47	03.01.02.00001257	Kalideres Jakarta Barat	240		300.144.000,00	1
48	03.01.02.00001258	Kalideres Jakarta Barat	87		96.361.000,00	1
49	03.01.02.00001259	Kreo Ciledug Tangerang	525	351	650.337.000,00	1
50	03.01.02.00001260	Jl. Yos Sudarso, Panjang Utara, Bandar Lampung	41.605	11014	71.571.961.000,00	1
51	03.01.02.00001261	Desa Sukorejo, Sidoarjo, Jatim	406	200	236.699.000,00	1
52	03.01.02.00001262	Desa Bongkaran, Pabean, Cantian, Surabaya	2.197		23.259.138.000,00	4
53	03.01.02.00001263	Desa Bongkaran, Pabean, Cantian, Surabaya				
54	03.01.02.00001264	Desa Bongkaran, Pabean, Cantian, Surabaya				
55	03.01.02.00001265	Desa Bongkaran, Pabean, Cantian, Surabaya				

No	No. Register	Alamat pada Bukti Kepemilikan	Luas (m2)		Nilai Wajar (Rp)	Jumlah dok. kepemilikan
			Tanah	Bangunan		
56	03.01.02.00001267	Cijayanti, Citeureup, Bogor	2.280		8.252.117.000,00	1
57	03.01.02.00001268	Jl. Brigjen Slamet Riyadi, Pasar Kliwon, Solo	553		2.516.297.300,00	1
58	03.01.02.00001269	Desa Margajaya, Bekasi Selatan, Bekasi	114	114	971.740.000,00	1
59	03.01.02.00001270	Komp. Puri Jatisampurna, Kel. Jatiraden, Bekasi	145		72.500.000,00	1
60	03.01.02.00001271	Jl. Cimuncang, Cibeunying Kidul, Bandung	5.840	1003	26.981.105.700,00	1
61	03.01.02.00001272	Jl. Jend. Sudirman, Palembang	54	54	403.982.000,00	1
62	03.01.02.00001273	Jl. Jend. Sudirman, Palembang	80	80	599.318.000,00	1
					224.200.145.000,00	**62**

Sinar Bonana

NO	NO. REGISTER	KAB/KOTA	PROVINSI	NOMOR DOK	LUAS TANAH	NILAI WAJAR
1	03.01.02.00001274	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	422	89	
2	03.01.02.00001275	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	85	77	
3	03.01.02.00001276	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	438	36	
4	03.01.02.00001277	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	386	100	
5	03.01.02.00001278	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	390	169	
6	03.01.02.00001279	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	452	140	
7	03.01.02.00001280	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	387	119	
8	03.01.02.00001281	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	254	255	
9	03.01.02.00001282	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	423	70	
10	03.01.02.00001283	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	437	292	
11	03.01.02.00001284	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	79	96	
12	03.01.02.00001285	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	80	94	
13	03.01.02.00001286	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	418	81	
14	03.01.02.00001287	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	403	520	
15	03.01.02.00001288	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	417	163	
16	03.01.02.00001289	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	391	585	
17	03.01.02.00001290	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	454	162	
18	03.01.02.00001291	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	425	50	
19	03.01.02.00001292	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	399	243	
20	03.01.02.00001293	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	410	94	

NO	NO. REGISTER	KAB/KOTA	PROVINSI	NOMOR DOK	LUAS TANAH	NILAI WAJAR
21	03.01.02.00001294	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	411	423	139.208.400.000
22	03.01.02.00001295	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	385	84	
23	03.01.02.00001296	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	388	122	
24	03.01.02.00001297	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	398	205	
25	03.01.02.00001298	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	78	761	
26	03.01.02.00001299	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	81	52	
27	03.01.02.00001300	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	397	108	
28	03.01.02.00001301	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	402	219	
29	03.01.02.00001302	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	395	65	
30	03.01.02.00001303	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	789	108	
31	03.01.02.00001304	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	396	133	
32	03.01.02.00001305	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	405	40	
33	03.01.02.00001306	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	400	234	
34	03.01.02.00001307	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	406	81	
35	03.01.02.00001308	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	401	181	
36	03.01.02.00001309	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	165	94	
37	03.01.02.00001310	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	133	364	
38	03.01.02.00001311	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	103	568	
39	03.01.02.00001312	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	49	1.238	
40	03.01.02.00001313	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	19	4.914	
41	03.01.02.00001314	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	6197/229	1.600	
42	03.01.02.00001315	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	366	178	
					15.207	**139.208.400.000**

GRIYA POTENSA

No	NO. REGISTER	Jenis Properti	Jenis Hak	Nomor Hak	LUAS		Nilai
					TNH	BGN	
1	03.01.02.00001316	Tanah	HGB	05538	96 m2	-	131.000.000
2	03.01.02.00001317	Tanah	HGB	06354 dan 05531	120 m2	-	164.000.000
							295.000.000

COVERNOTE

NO	NO. REGISTER	Alamat	Kab	Luas Tanah	Kepemilikan	Nomor	Jumlah Dokumen	Tanggal Sertifikat	Nilai
1	03.01.02.00001318	Jln. Pemandangan II No.33	JAKARTA UTARA	66	Hak Pakai	20	1	28522	-
2	03.01.02.00001319	Jln. Pemandangan II No.33	JAKARTA UTARA	66	Hak Pakai	40	1	34212	-
4	03.01.02.00001321	Tawang Sari	SEMARANG	0	SHGB	2227	1		125.000.000
5	03.01.02.00001322	Jalan Basuki Rahmat No. 49-51	SURABAYA	1575	SHGB	528	1		195.776.000.000
6	03.01.02.00001323	Jalan Basuki Rahmat No. 49-51	SURABAYA	1251	SHGB	306/K	1		
7	03.01.02.00001324	Jalan Basuki Rahmat No. 49-51	SURABAYA	1890	SHGB	342/K	1		
8	03.01.02.00001325	Jalan Basuki Rahmat No. 49-51	SURABAYA	1402	SHGB	527	1		
9	03.01.02.00001326	Kalimo'ok, Sumenep	SUMENEP	8453	SHM (Sertifikat Hak Milik)	85	1		542.314.376
10	03.01.02.00001327	Kalimo'ok, Sumenep	SUMENEP	8435	SHM (Sertifikat Hak Milik)	86	1		
11	03.01.02.00001328	Jl.Abdul Muis No.60	JAKARTA PUSAT	1410	SHGB	615/Petojo Selatan	1	36707	76.843.616.000
12	03.01.02.00001329	Desa Gilang	SIDOARJO	774	SHM (Sertifikat Hak Milik)	182	1		120.981.413
13	03.01.02.00001330	Komplek Armada Estate Blok G.2/11	KOTA MAGELANG	105	SHGB	1776	1	35675	37.327.391
14	03.01.02.00001331	Jl. Darmo Permai Utama No. 70	SURABAYA	216	SHGB	2191	1	34631	308.452.153
17	03.01.02.00001332	Mertoyudan	MAGELANG	0	SHGB	113	1		-
18	03.01.02.00001333	Tegal Alur		663	SHM (Sertifikat Hak Milik)	669	1		-
19	03.01.02.00001334	Tegal Alur		243	SHM (Sertifikat Hak Milik)	687	1		-
20	03.01.02.00001335	Tegal Alur		133	SHM (Sertifikat Hak Milik)	666	1		-
21	03.01.02.00001336	Tegal Alur		681	SHM (Sertifikat Hak Milik)	847	1		-
22	03.01.02.00001337	JALAN MANGGA BESAR VI SELATAN NOMOR 71	JAKARTA BARAT	138	SHGB	1073	1		3.354.748.000
23	03.01.02.00001338	Kedawung Wetan	PASURUAN	45	SHM (Sertifikat Hak Milik)	271	1	35794	-
24	03.01.02.00001339	Jl TH.E Blok AB Kaveling	JAKARTA UTARA	167	SHGB	4785	1		-
25	03.01.02.00001340	kapuk	JAKARTA BARAT	1806	SHM (Sertifikat Hak Milik)	624/Kapuk	1		-
26	03.01.02.00001341	Ruko Ciputat Mega Mal Blok F 10 jl Ir. H. Juanda	KAB. TANGERANG	0	SHGB		1		635.255.000
27	03.01.02.00001342	Jakasampurna	KOTA BEKASI	1690	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1394	1		-

NO	NO. REGISTER	Alamat	Kab	Luas Tanah	Kepemilikan	Nomor	Jumlah Dokumen	Tanggal Sertifikat	Nilai
28	03.01.02.00001343	Jakasampurna	KOTA BEKASI	500	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1395	1		-
29	03.01.02.00001344	Curug	KOTA BOGOR	170	SHGB	5/Curug	1		174.490.000
30	03.01.02.00001345	Jalupang	KAB. TANGERANG	195	SHGB	350 / Jalupang	1		677.246.250
31	03.01.02.00001346	Jalupang	KAB. TANGERANG	155	SHGB	514 / Jalupang	1		
32	03.01.02.00001347	Desa Lengkong Gudang	KAB. TANGERANG	250	SHGB	1009 / Lengkong Gudang	1		125.188.000
33	03.01.02.00001348	Kutajaya	KAB. TANGERANG	90	SHGB	2048 / Kutajaya	1		23.530.500
34	03.01.02.00001349	Depok	DEPOK	232	SHGB	127 / Depok	1		258.461.891
35	03.01.02.00001350	Jatibening	KOTA BEKASI	201	SHGB	6062 / Jatibening	1		175.000.000
36	03.01.02.00001351	Kedung Waringin	KOTA BOGOR	85	SHGB	35 / Kedung Waringin	1		7.260.000
37	03.01.02.00001352	Baranangsiang	KOTA BOGOR	321	SHGB	437 / Baranangsiang	1		-
38	03.01.02.00001353	Bugel	KOTA TANGERANG	102	SHGB	288 / Bugel	1		54.667.890
39	03.01.02.00001354	Sukmajaya	DEPOK	70	SHGB	3654 / Sukmajaya	1		104.058.173
40	03.01.02.00001355	Tugujaya	KABUPATEN BOGOR	1322	SHM (Sertifikat Hak Milik)	85 / Tugujaya	1		40.000.000
41	03.01.02.00001356	Jakasetia	KOTA BEKASI	240	SHU	2760 / Jakasetia	1		27.053.750
42	03.01.02.00001357	-	KABUPATEN BOGOR	2013060	SHGU	3/CIKOPOMAYAK	1		20.130.600.000
43	03.01.02.00001358	-	KAB. TANGERANG	328	SHGB	749	1		-
44	03.01.02.00001359	-	KAB. TANGERANG	1505	SHGB	746	1		-
45	03.01.02.00001360	-	KAB. TANGERANG	2470	SHGB	1025	1		-
46	03.01.02.00001361	-	KAB. TANGERANG	1662	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1024	1		-
47	03.01.02.00001362	-	KAB. TANGERANG	2915	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1023	1		-
48	03.01.02.00001363	-	KAB. TANGERANG	2830	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1022	1		-
49	03.01.02.00001364	-	KAB. TANGERANG	7060	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1021	1		-
50	03.01.02.00001365	-	KAB. TANGERANG	1470	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1020	1		-
51	03.01.02.00001366	-	KAB. TANGERANG	665	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1019	1		-
52	03.01.02.00001367	-	KAB. TANGERANG	1890	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1018	1		-
53	03.01.02.00001368	-	KAB. TANGERANG	2880	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1017	1		-
54b	03.01.02.00001369-B	-	KAB. TANGERANG	300000	SHU	1	0		46.516.380.000

NO	NO. REGISTER	Alamat	Kab	Luas Tanah	Kepemilikan	Nomor	Jumlah Dokumen	Tanggal Sertifikat	Nilai
54b	03.01.02.00001369-C	-	KAB. TANGERANG	2291955	SHU	1	1		22.919.550.000
55	03.01.02.00001370	SPRINGVALE/1327	KABUPATEN BOGOR	1211	SHGB	PPJB Asli kav pecahan SHGB No.12 Luwinutug dan SHGB 13 Tangkil	1		2.207.288.000
57	03.01.02.00001372	SPRINGVALE/1360	KABUPATEN BOGOR	883	SHGB	PPJB Asli kav pecahan SHGB No.12 Luwinutug dan SHGB 13 Tangkil	1		1.789.630.000
59	03.01.02.00001374	SPRINGVALE/1396	KABUPATEN BOGOR	1004	SHGB	PPJB Asli kav pecahan SHGB No.12 Luwinutug dan SHGB 13 Tangkil	1		2.034.868.000
61	03.01.02.00001376	SPRINGVALE/1388	KABUPATEN BOGOR	1646	SHGB	PPJB Asli kav pecahan SHGB No.12 Luwinutug dan SHGB 13 Tangkil	1		3.302.459.000
63	03.01.02.00001378	SPRINGVALE/1310	KABUPATEN BOGOR	1470	SHGB	PPJB Asli kav pecahan SHGB No.12 Luwinutug dan SHGB 13 Tangkil	1		2.979.338.000
65	03.01.02.00001380	SPRINGVALE/1350	KABUPATEN BOGOR	1220	SHGB	PPJB Asli kav pecahan SHGB No.12 Luwinutug dan SHGB 13 Tangkil	1		2.472.648.000
67	03.01.02.00001382	SPRINGVALE/1361	KABUPATEN BOGOR	877	SHGB	PPJB Asli kav pecahan SHGB No.12 Luwinutug dan SHGB 13 Tangkil	1		1.783.879.000
68	03.01.02.00001383	SPRINGVALE/1362	KABUPATEN BOGOR	946	SHGB	PPJB Asli kav pecahan SHGB No.12 Luwinutug dan SHGB 13 Tangkil	1		1.923.511.000
70	03.01.02.00001385	SPRINGVALE/1372	KABUPATEN BOGOR	1187	SHGB	PPJB Asli kav pecahan SHGB No.12 Luwinutug dan SHGB 13 Tangkil	1		2.405.765.000
73	03.01.02.00001388	Cibeureum	KABUPATEN BANDUNG	0	Girik	Persil No.44 S.II Kohir No.1254	1		-
74	03.01.02.00001389	Cibeureum	KABUPATEN BANDUNG	0	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1041/Cigugur	1		-
75	03.01.02.00001390	Cibeureum	KABUPATEN BANDUNG	0	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1071/Cigugur	1		-
76	03.01.02.00001391	Cibeureum	KABUPATEN BANDUNG	0	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1072/Cigugur	1		-
77	03.01.02.00001392	Cibeureum	KABUPATEN BANDUNG	0	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1073/Cigugur	1		-
78	03.01.02.00001393	Cibeureum	KABUPATEN BANDUNG	0	SHM (Sertifikat Hak Milik)	731	1		-
79	03.01.02.00001394	Cibeureum	KABUPATEN BANDUNG	0	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1096/Cigugur	1		-
80	03.01.02.00001395	Cibeureum	KABUPATEN BANDUNG	0	SHM (Sertifikat Hak Milik)	645/Cigugur	1		-
81	03.01.02.00001396	Cibeureum	KABUPATEN BANDUNG	0	SHM (Sertifikat Hak Milik)	536/Cigugur	1		-
82	03.01.02.00001397	Cibeureum	KABUPATEN BANDUNG	0	SHM (Sertifikat Hak Milik)	760/Cigugur	1		-

NO	NO. REGISTER	Alamat	Kab	Luas Tanah	Kepemilikan	Nomor	Jumlah Dokumen	Tanggal Sertifikat	Nilai
83	03.01.02.00001398	Cibeureum	KABUPATEN BANDUNG	0	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1095/Cigugur	1		-
84	03.01.02.00001399	Jl. Lenteng Agung Raya	JAKARTA SELATAN	889	SHM (Sertifikat Hak Milik)	314	1	33366	-
85	03.01.02.00001400	Jln.Taman Beringin No.17	KAB. SEMARANG	721	SHM (Sertifikat Hak Milik)	52	1		-
86	03.01.02.00001401	-	KAB. SEMARANG	478	SHGB	245	1		-
87	03.01.02.00001402	-	KAB. SEMARANG	294	SHGB	161	1		-
88	03.01.02.00001403	-	KAB. SEMARANG	244	SHGB	244	1		-
89	03.01.02.00001404	Jl. Kelapa Sawit VII, Blok DC 6	JAKARTA UTARA	193	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1730	1	30522	-
90	03.01.02.00001405	Jl. Kelapa Sawit VII, Blok DC 5	JAKARTA UTARA	194	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1661	1	30459	-
91	03.01.02.00001406	-	GRESIK	13740	SHGB	30	1	32973	799.582.250
92	03.01.02.00001407	-	GRESIK	5055	SHGB	38	1	30705	
93	03.01.02.00001408	MACCINI	MAKASSAR	0	SHGB	209	1	31058	-
94	03.01.02.00001409	Jalan Tropodo II No.17	SIDOARJO	0	SHM (Sertifikat Hak Milik)	329	1		-
95	03.01.02.00001410	Jalan Jagal Babi kav. 16 Blok A2	JAKARTA BARAT	141	SHGB	1249	1	31736	1.098.900.000
96	03.01.02.00001411	Jalan Mangga Besar IVA no. 22	JAKARTA BARAT	387	SHGB	114/Mangga Besar	1		8.525.055.000
97	03.01.02.00001412	Sukorejo	SIDOARJO	1478	SHM (Sertifikat Hak Milik)	286	1		-
98	03.01.02.00001413	Perkav. Taman Modern Block C.6 Kav. No. 17	JAKARTA TIMUR	0	SHGB	609/Ujung Menteng	1		688.139.000
							86		**400.988.243.037**

RINCIAN ASET NOSTRO

No	Eks. Bank Asal	Bank Penyimpan	Status Bank Penyimpan	Nilai per 31 Desember 2022	Mutasi	Nilai per 31 Desember 2023
Rekening Nostro tercatat dalam Neraca						
1	Bank Dewa Rutci	Bank Ganesha	Bank dalam negeri	Rp4,089,257,489.50	(Rp584,179,642)	Rp 3,505,077,847.50
2	BIRA	ClearStream Banking SA sebesar USD258.438,5	Bank luar negeri	0		Rp -
3	Bank Bahari	Coutts Bank Hongkong Branch sebesar USD350.526,24	Bank luar negeri	0		Rp -
Total				**Rp4,089,257,489.50**	**(Rp584,179,642)**	**Rp 3,505,077,847.50**
Rekening Nostro tercatat dalam CaLK						
1	Bank Central Dagang BBKU	Bank CIC, Jakarta	Bank dalam negeri	Rp2,044,748.60		Rp2,044,748.60
3	BUN	BRI Cut Mutiah		Rp83,311,328.35		Rp83,311,328.35
4	BUN	Citibank		Rp8,776,916,074.45		Rp8,776,916,074.45
5	BDNI	BPR Tri Sejahtera Makmur, Jkt		Rp97,686,237.95		Rp97,686,237.95
6	BDNI	Bank Ganesha, Jkt		Rp706,429,119.47		Rp706,429,119.47
7	Bank Dewa Rutci	Bank Ganesha, Jkt		Rp196,059,779.49		Rp196,059,779.49
8	Bank Kharisma BBKU	Bank Aspac	telah dikuidasi (BBO/BBKU)	Rp287,761.43		Rp287,761.43
9	Bank Budi Internasional BBKU	Bank Astria (dalam likuidasi)		Rp6,601,373.85		Rp6,601,373.85
10	Bank Aken BBKU	Bank Central Dagang		Rp625,069.88		Rp625,069.88
11	SANHO	Bank Central Dagang		Rp2,994,990.16		Rp2,994,990.16
14	HOKINDO	Bank Modern		Rp6,207,877.95		Rp6,207,877.95
15	SURYA	Bank Umum Majapahit		Rp122,086,331.08		Rp122,086,331.08
16	SANHO	Bank Umum Servitia		Rp4,887,591.05		Rp4,887,591.05
17	BDNI	BDNI Finance, Hongkong		Rp1,020,060,447.69		Rp1,020,060,447.69
18	HOKINDO	Bank Pelita		Rp6,017,122.84		Rp6,017,122.84
19	ARYA PANDUARTA	Bank Bahari		Rp11,739,033.84		Rp11,739,033.84
20	Bank Kharisma BBKU	Indover Bank	Bank Indover	Rp141,402,439.43		Rp141,402,439.43
21	Bank Hastin Internasional BBKU	Indover Bank		Rp361,433,693.83		Rp361,433,693.83
22	BUS	Indover Bank		Rp2,864,035.05		Rp2,864,035.05
23	BDI	Indover Bank		Rp268,237,424.51		Rp268,237,424.51
24	Bank Sahid Gajah Perkasa BBKU	Indover Bank		Rp109,652,042.65		Rp109,652,042.65
25	BUN	Indover Bank		Rp925,492,300.93		Rp925,492,300.93
26	BUN	Indover Bank		Rp531,317,595.65		Rp531,317,595.65
27	Bank BIRA BBKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp24,530,231.65		Rp24,530,231.65
28	Bank Modern BBO	Indover Bank, Amsterdam		Rp32,416,251.32		Rp32,416,251.32
29	Bank Asia Pasific BBKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp16,993,382.21		Rp16,993,382.21
30	Bank Unibank BBKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp45,288,112.29		Rp45,288,112.29
31	Bank Unibank BBKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp24,849,497.60		Rp24,849,497.60
32	Bank Mashill Utama BBKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp354,542,691.02		Rp354,542,691.02
33	Bank Central Dagang BBKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp92,060,251.91		Rp92,060,251.91
34	Bank Ficorinvent BBKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp77,574,756.22		Rp77,574,756.22
35	DHARMALA	Indover Bank, Amsterdam		Rp1,139,267.42		Rp1,139,267.42
36	BDNI	Indover Bank, Amsterdam		Rp11,664,932.40		Rp11,664,932.40
37	BAHARI	Indover Bank, Amsterdam		Rp108,150,696.65		Rp108,150,696.65
38	PESONA	Indover Bank, Amsterdam		Rp120,045,719.99		Rp120,045,719.99
39	Mashil Utama	Indover Bank, Amsterdam		Rp341,740,942.42		Rp341,740,942.42
40	Bank Modern BBO	Indover Bank, Hamburg		Rp195,403,134.60		Rp195,403,134.60

No	Eks. Bank Asal	Bank Penyimpan	Status Bank Penyimpan	Nilai per 31 Desember 2022	Mutasi	Nilai per 31 Desember 2023
41	Bank Asia Pasific BBKU	Indover Bank, Hamburg		Rp956,004,466.45		Rp956,004,466.45
42	Bank Unibank BBKU	Indover Bank, Hamburg		Rp2,996,775.68		Rp2,996,775.68
43	BAHARI	Indover Bank, Hamburg		Rp254,274,894.54		Rp254,274,894.54
44	PESONA	Indover Bank, Hamburg		Rp27,358,123.38		Rp27,358,123.38
45	BDNI	Indover Ing Bank		Rp122,424,186.80		Rp122,424,186.80
46	BDNI	Bank Indonesia	Bank Indonesia	Rp406,733,525,331.33		Rp406,733,525,331.33
47	BDNI	Rekening Nostro (Unidentified)	tidak diketahui	Rp2,359,921,197.78		Rp2,359,921,197.78
48	BDNI	Keppel Bank, Singapore		Rp2,257,377,867.88		Rp2,257,377,867.88
49	BDNI	Indovina Bank (Khusus Deviden)		Rp1,758,722,655.31		Rp1,758,722,655.31
50	BDNI	American Express Bank, NY		Rp1,834,239,834.61		Rp1,834,239,834.61
51	BDNI	ANZ Banking Group Bank		Rp666,429,511.70		Rp666,429,511.70
52	PESONA	Banca Comerciale		Rp61,815,826.61		Rp61,815,826.61
53	DHARMALA	Banco Ambrosiano (BAVE)		Rp44,241,246.97		Rp44,241,246.97
54	BDNI	Bank Boston, NA Singapore		Rp2,270,531.95		Rp2,270,531.95
55	SURYA	Bank Brussel Lambert		Rp378,699,549.31		Rp378,699,549.31
56	SURYA	Bank Credit Issue		Rp234,342,412.12		Rp234,342,412.12
57	Bank Yama BBKU	Bank Mashill		Rp58,834,913.90		Rp58,834,913.90
58	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Hongkong		Rp65,028,723.58		Rp65,028,723.58
59	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Kuala Lumpur		Rp41,766,481.92		Rp41,766,481.92
60	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, New York		Rp6,616,463,903.03		Rp6,616,463,903.03
61	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Singapore		Rp266,632,029.06		Rp266,632,029.06
62	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Tokyo		Rp339,690,834.35		Rp339,690,834.35
63	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Toronto		Rp357,108,818.21		Rp357,108,818.21
64	HOKINDO	Bank Pacific		Rp6,463,800.47		Rp6,463,800.47
65	BDNI	Banque Worms, Singapore		Rp208,766,445.27		Rp208,766,445.27
66	BDNI	Banque Worms, Singapore		Rp327,222,390.61		Rp327,222,390.61
67	BDNI	BBMB, Kuala Lumpur		Rp1,675,910.59		Rp1,675,910.59
68	BUN	BCCI London		Rp1,312,775,083.50		Rp1,312,775,083.50
69	BUN	BNP Singapore	Bank luar negeri	Rp490,837,088.12		Rp490,837,088.12
70	BDNI	Chase Manhattan Bank, Singapore		Rp4,122,298.55		Rp4,122,298.55
71	BUN	Chemical Bank		Rp909,494,195.25		Rp909,494,195.25
72	BUN	National Australia Bank		Rp980,037,418.44		Rp980,037,418.44
73	BUN	National Australia Bank (Draft)		Rp103,609,247.09		Rp103,609,247.09
74	BUN	National Westminster		Rp1,708,457,513.38		Rp1,708,457,513.38
75	Bank Ficorinvent BBKU	National Westmonster Bank, London		Rp1,332,284,084.60		Rp1,332,284,084.60
76	BDNI	Security Pasific Nat'l Bank Singapore		Rp25,528,725.87		Rp25,528,725.87
77	Bank Modern BBO	Standard Chartered Bank, New York		Rp72,226,080.57		Rp72,226,080.57
78	Bank Modern BBO	Standard Chartered Bank, Sidney		Rp566,327,485.65		Rp566,327,485.65
79	Bank Modern BBO	Standard Chartered Bank, Tokyo		Rp456,068,074.81		Rp456,068,074.81
80	BDNI	Sumitotmo Bank Ltd, Tokyo		Rp1,550,878,033.20		Rp1,550,878,033.20
81	BUN	Summa Hanlebank		Rp219,893,772.84		Rp219,893,772.84
82	BUN	Swiss Bank Corporation		Rp457,663,217.47		Rp457,663,217.47
83	BDNI	The Dai Ichi Kangyo Bank, NY		Rp449,662,818.68		Rp449,662,818.68
84	Bank Modern BBO	UBOC, New York		Rp25,317,208.51		Rp25,317,208.51
85	BUN	UMBC KualaLumpur		Rp230,472,902.02		Rp230,472,902.02
86	Bank Central Dagang BBKU	Union Bank of California		Rp124,810,097.58		Rp124,810,097.58
87	Bank Metropolitan BBKU	Union Bank of California		Rp22,488,860.17		Rp22,488,860.17
88	Bank Central Dagang BBKU	Union Bank of Switzerland, Zurich		Rp93,484,495.37		Rp93,484,495.37

No	Eks. Bank Asal	Bank Penyimpan	Status Bank Penyimpan	Nilai per 31 Desember 2022	Mutasi	Nilai per 31 Desember 2023
89	Bank Modern BBO	United Bank of Swiss, Switzerland		Rp51,007,390.52		Rp51,007,390.52
90	BDNI	United Pasific Bank, LA		Rp1,926,555,302.27		Rp1,926,555,302.27
91	PESONA	Westpac Bank Sidney		Rp7,752,795.93		Rp7,752,795.93
92	Masih dalam penelusuran			Rp508,554,149.20		Rp508,554,149.20
Total				**Rp454,445,361,290.83**		**Rp454,445,361,290.83**

Surat Berharga Non Saham Eks BPPN

No.	Nama Aset	Bentuk Surat Berharga	Nominal	Mata Uang	Jumlah Lembar	Nilai Pasar per 31 Desember 2023	Tanggal Nilai Pasar	Nilai Konversi Rupiah per 31 Desember 2022	mutasi	Nilai Konversi Rupiah per 31 Desember 2023	Keterangan	Kustodian
a. Corporate Bonds												
1	DGS International Finance Co.	*Scripless*	0.01	USD	1,000,000	-		-	-	-	Telah Dihapuskan oleh Citibank Hongkong	HONGKONG
2	Bank Dagang Nasional Indonesia	*Scripless*	102	USD	4,500,000	4,584,686	44680	71,484,416,316	- 701,456,882	70,782,959,435	BBO (Telah Likuidasi)	BRUSSEL
3	TPE International Finance Co. Bv	*Scripless*	1	USD	25,000,000	250,000	44286	3,898,000,000	- 38,250,000	3,859,750,000	EmitenTidak Diketahui	BRUSSEL
4	Ciputra Surya	*Coupon*	38,750,000	IDR	-	38,750,000	39626	38,750,000	-	38,750,000	Emiten Aktif	JAKARTA
5	Jakarta International Hotel	*Coupon*	800,000,000	IDR	-	800,000,000	39626	800,000,000	-	800,000,000	EmitenTidak Diketahui	JAKARTA
6	Mulia Glass	*Coupon*	38,125,000	IDR	-	38,125,000	39626	38,125,000	-	38,125,000	EmitenTidak Diketahui	JAKARTA
7	Mulia Keramik	*Coupon*	38,125,000	IDR	-	38,125,000	39626	38,125,000	-	38,125,000	EmitenTidak Diketahui	JAKARTA
8	Polysindo Eka Perkasa	*Scripless*	2	USD	3,000,000	63,000	44530	982,296,000	- 9,639,000	972,657,000	Emiten Aktif	BRUSSEL
9	TPE International Finance Co. Bv	*Scripless*	1	USD	2,000,000	20,000	44286	311,840,000	- 3,060,000	308,780,000	EmitenTidak Diketahui	BRUSSEL
10	Bank Papan	*Principal dan Coupon*	100	IDR	500,000,000	500,000,000	10 Juni 2015	500,000,000	-	500,000,000	BBO (Telah Likuidasi)	JAKARTA
11	Polysindo Eka Perkasa	*Scripless*	2	USD	4,000,000	84,000	44680	1,309,728,000	- 12,852,000	1,296,876,000	Emiten Aktif	EUROCLEAR
12	Polysindo Eka Perkasa	*Scripless*	88	USD	182,000	160,547	44680	2,503,256,308	- 24,563,764	2,478,692,544	Emiten Aktif	EUROCLEAR
Total								**81,904,536,624**	**- 789,821,646**	**81,114,714,978**		
b. Medium Term Notes												
1	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	*Scripless*	94	USD	182,000	170,937	44680	2,665,257,344	- 26,153,436	2,639,103,908	Emiten Aktif	EUROCLEAR
2	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	*Scripless*	90	USD	20,000,000	18,000,000	44649	280,656,000,000	- 2,754,000,000	277,902,000,000	Emiten Aktif	HONGKONG
3	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	*Scripless*	90	USD	960,560	864,504	44680	13,479,346,368	- 132,269,112	13,347,077,256	Emiten Aktif	HONGKONG
4	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	*Scripless*	90	USD	965,840	869,256	44680	13,553,439,552	- 132,996,168	13,420,443,384	Emiten Aktif	HONGKONG
5	Hutama Karya	*Principal*	100	USD	1,000,000	1,000,000	38261	15,592,000,000	- 153,000,000	15,439,000,000	MTN Telah dinyatakan batal dan tidak berlaku	JAKARTA
6	Hutama Karya	*Principal*	100	USD	1,000,000	1,000,000	38261	15,592,000,000	- 153,000,000	15,439,000,000	MTN Telah dinyatakan batal dan tidak berlaku	JAKARTA
7	Hutama Karya	*Principal*	100	USD	1,000,000	1,000,000	38261	15,592,000,000	- 153,000,000	15,439,000,000	MTN Telah dinyatakan batal dan tidak berlaku	JAKARTA
8	Hutama Karya	*Principal*	100	USD	5,000,000	5,000,000	38261	77,960,000,000	- 765,000,000	77,195,000,000	MTN Telah dinyatakan batal dan tidak berlaku	JAKARTA
Total								**435,090,043,264**	**- 4,269,418,716**	**430,820,624,548**		
c. Non-Convertible Debentures												
1	Polysindo Eka Perkasa	*Principal*	100	IDR	5,000,000,000	5,000,000,000	44679	5,000,000,000	-	5,000,000,000	Emiten Aktif	JAKARTA
Total								**5,000,000,000**	**-**	**5,000,000,000**		
Total (a+b+c)								**521,994,579,888**	**- 5,059,240,362**	**516,935,339,526**		

Aset Saham Eks BPPN

No.	Nama Emiten	*Core Business Emiten*	Bentuk Saham	Jumlah Lembar	Nilai per Lembar Saham Per 31 Desember 2022	Nilai Per 31 Desember 2022	Mutasi	Nilai Per 31 Desember 2023 2023	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Konfirmasi kepada Emiten/Ditjen AHU/OJK	Tanggapan Emiten	Nomor Surat Emiten	Ditjen AHU/OJK
1	PT Apac Citra Centertex, Tbk (PT Asia Pacific Investama, Tbk) (MYTX)	Manufaktur Textile	Sertifikat	32,137,300	69	1,735,414,200	192,823,800	1,928,238,000	Aktif	Nilai berdasarkan harga di bursa per tanggal 31 Desember 2022	Surat Nomor S-1353/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	-	-	-
2	PT Apac Citra Centertex, Tbk (PT Asia Pacific Investama, Tbk) (MYTX)	Manufaktur Textile	Sertifikat	37,459,700	69	2,022,823,800	224,758,200	2,247,582,000	Aktif	Nilai berdasarkan harga di bursa per tanggal 31 Desember 2022	Surat Nomor S-1352/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	-	-	-
3	PT Aster Dharma Ind.	-	***Scripless***	40,000	850	34,000,000	-	34,000,000	Status Emiten Tidak Diketahui. Saham sudah tidak tercatat di	1. Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 30 Desember 2022.	1. Surat Nomor S-422/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 kepada Ditjen AHU 2. surat nomor S-135/KN.4/2022 tanggal 16 Juni 2022 kepada Direktur PT KSEI	-	-	Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak jelas
4	PT Bank Dagang Nasional Indonesia	-	Sertifikat	46,250	75	3,468,750	-	3,468,750	BBO	1. Nilai per tanggal 28 Februari 2007 berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Mei 2022.	-	-	-	-
5	PT Bank Dagang Nasional Indonesia	-	Sertifikat	363	75	27,225	-	27,225	BBO	1. Nilai per tanggal 28 Februari 2007 berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Mei 2022.	-	-	-	-
6	PT Bank Ficorinvest	-	Sertifikat	400	**50**	20,000	-	20,000	BBKU	1. Nilai per tanggal 28 Februari 2007 berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Mei 2022.	-	-	-	-
7	PT Bank PDFCI	-	Sertifikat	250	**350**	87,500	-	87,500	BTO	1. Nilai per tanggal 28 April 2006 berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Mei 2022.	-	-	-	-
8	PT Bank Surya	-	Sertifikat	800	**300**	240,000	-	240,000	BBO	1. Nilai per tanggal 29 September 2006 berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Mei 2022.	-	-	-	-
9	PT Citatah Tbk (CTTH)	Penggalian batu alam, pengolahan, desain dan distribusi bahan bangunan	***Scripless***	11,304,425	**50**	565,221,250	(429,568,150)	135,653,100	Aktif	Nilai berdasarkan harga di bursa per tanggal 31 Desember 2022	Surat Nomor S-1350/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham Kementerian Keuangan	034/CTT/TF/Lrg al/VII/14 tanggal 10 Juli 2014	-
10	PT Citatah Tbk (CTTH)	Penggalian batu alam, pengolahan, desain dan distribusi bahan bangunan	***Scripless***	41,421,439	**50**	2,071,071,950	(1,574,014,682)	497,057,268	Aktif	Nilai berdasarkan harga di bursa per tanggal 31 Desember 2022	Surat Nomor S-1351/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham	034/CTT/TF/Lrg al/VII/14 tanggal 10 Juli 2014	-
11	PT Gajah Tunggal, Tbk (GJTL)	Manufaktur Ban	Sertifikat	200	810	112,000	95,000	207,000	Aktif	Nilai berdasarkan harga di bursa per tanggal 31 Desember 2022	Surat Nomor S-475/KN.5/2021 tanggal 29 Maret 2021 kepada Datindo Entrycom selaku BAE	Informasi saham dan petunjuk untuk konversi/balik nama saham	DE/IV/21-1905 tanggal 12 April 2021	-
12	PT Holcim Indonesia, Tbk (PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk) (SMCB)	Manufaktur Semen	Sertifikat	13,898,500	1,250	19,805,362,500	(1,111,880,000)	18,693,482,500	Aktif	Nilai berdasarkan harga di bursa per tanggal 31 Desember 2022	Surat Nomor S-553/KN.5/2021 tanggal 1 April 2021 kepada Datindo entrycom selaku BAE	informasi pemilik saham, dividen dan konversi saham/balik nama	DE/IV/21-1908 tanggal 15 April 2021	-
13	PT Langgeng Makmur Industri, Tbk (LMPI)	Manufaktur Plastik	***Scripless***	57,901,002	135	6,716,516,232	(289,505,010)	6,427,011,222	Aktif	Nilai berdasarkan harga di bursa per tanggal 31 Desember 2022	Surat Nomor S-1367/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Confirm atas kepemilikan saham Kementerian Keuangan	102/VII/14/lm-sb tanggal 11 Juli 2014	-
14	PT Star Pacipic, Tbk (dlh. PT Lippo E-Net) (LPLI)	Investasi dan bisnis me	Sertifikat	100	252	27,400	(4,000)	23,400	Aktif	Nilai berdasarkan harga di bursa per tanggal 31 Desember 2022	Surat Nomor S-1368/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	-	-	-
15	PT Merck, Tbk. (MERK)	Farmasi dan Kimia	Sertifikat	100	**4,700**	475,000	(66,000)	409,000	Aktif	Nilai berdasarkan harga di bursa per tanggal 31 Desember 2022	1. Surat Nomor S-801/KN.5/2021 tanggal 25 April 2021 2. Surat Nomor S-1510/KN.5/2021 tanggal 12 Juli 2021 kepada Emiten dan BAE	Tanggapan surat S-801: PT BDNI tidak ada dalam database Pemegang saham. Meminta informasi nama pihak ketiga PS	07/CS/MS/V/202 1 tanggal 3 Mei 2021	
17	PT Multi Sarana R. Agung	-	Sertifikat	94,600	**675**	63,855,000	-	63,855,000	Status Emiten Tidak Diketahui. Saham delisted	Nilai per 30 November 2006 berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Mei 2022. Keterangan: Delisted.	Surat Nomor S-423/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 kepada Ditjen AHU	-	-	Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak jelas
18	PT Perdana Inti Investama	-	Sertifikat	49,251,500	50	2,462,575,000	-	2,462,575,000	Status Emiten Tidak Diketahui	Nilai per 28 Februari 2007 berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Mei 2022.	1. Surat Nomor S-424/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 kepada Ditjen AHU 2. Surat Nomor S-69/KN.5/2021 tanggal 1 Februari 2021 kepada Direktur IKNB OJK			1. Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak jelas 2. surat Direktur kelembagaan dan produk IKNB: S-
19	PT Prima Alloy Steel Universal, Tbk (PRAS)	Manufaktur velg Kendaraan (Industri Otomotif)	Sertifikat	2,500	157	380,000	(137,500)	242,500	Aktif	Nilai berdasarkan harga di bursa per tanggal 31 Desember 2022	Surat Nomor S-623/KN.5/2021 tanggal 7 April 2021 kepada PT Raya Saham Registra selaku BAE. Konfirmasi PT Exim Securities sebagai PS saham eks BPPN	Tanggapan: PT Exim Securities tidak terdaftar di DPS	001/DIR-RSR/PRAS/2021 tanggal 19 April 2021	-
20	PT Sreeya Sewu Indonesia (PT Sierad Produce, Tbk (SIPD))	Peternakan	***Scripless***	1,918,865	1,000	2,734,382,625	(863,489,250)	1,870,893,375	Aktif	Nilai berdasarkan harga di bursa per tanggal 31 Desember 2022	Surat Nomor S-1372/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	-	-	-

No.	Nama Emiten	*Core Business Emiten*	Bentuk Saham	Jumlah Lembar	Nilai per Lembar Saham Per 31 Desember 2022	Nilai Per 31 Desember 2022	Mutasi	Nilai Per 31 Desember 2023 2023	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Konfirmasi kepada Emiten/Ditjen AHU/OJK	Tanggapan Emiten	Nomor Surat Emiten	Ditjen AHU/OJK
21	PT Sucaco, Tbk (PT Supreme Cable Manufacturing, Tbk) (SCCO)	Manufaktur Kabel	Sertifikat	700	9,175	6,055,000	1,050,000	7,105,000	Aktif	Nilai berdasarkan harga di bursa per tanggal 31 Desember 2022	1. Surat Nomor S-651/KN.5/2021 tanggal 9 April 2021 kepada PT Sinartama Gunita selaku BAE 2. Surat Nomor S-1004/KN.5/2021 tanggal 16 Mei 2021 kepada emiten	1. Tanggapan Surat S-651: PS tercatat an Bank Utama bukan PT OVERSEAS	1. 91/SG-CA/KBLM/IV/2021 tnggal 7 April 2021	-
22	PT Sucaco, Tbk (PT Supreme Cable Manufacturing, Tbk) (SCCO)	Manufaktur Kabel	***Scripless***	348,000	9,175	3,010,200,000	522,000,000	3,532,200,000	Aktif	Nilai berdasarkan harga di bursa per tanggal 31 Desember 2022	Surat Nomor S-1374/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Confirm atas kepemilikan saham Kementerian Keuangan	290/XL.08/FD/2014 tanggal 14 Agustus	-
23	PT Trias Sentosa, Tbk (TRST)	Manufaktur polypropylene dan polyester film	Sertifikat	100	670	73,500	(26,100)	47,400	Aktif	Nilai berdasarkan harga di bursa per tanggal 31 Desember 2022	Surat Nomor S-1375/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham	34/JT/PTTS/2014 tanggal 15 Juli 2014	-
Total						**41,232,388,532**	**(3,327,963,692)**	**37,904,425,240**						

No.	Nama Emiten	*Core Business*	Persentase Kepemilikan	Jumlah Lembar	Nilai Per Lembar Saham 30 Juni 2023	Nilai Per 31 Desember 2022	Mutasi	Nilai Per 31 Desember 2023	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten
1	PT Karabha Digdaya	Pengembagan dan pengelolaan sarana permukiman dan penyediaan sarana olahraga golf	100.00%	10,000	-	Rp -	Rp -	Rp -	Aktif	Telah diserahkan pengelolaannya kepada Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan sesuai Surat Perintah Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor PRIN-25.1/KN/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan Berita Acara Serah Terima tentang Pengelolaan Aset Saham Nomor BA-1/KN.2/2020 tanggal 22 Januari 2020	Desa Tapos, Kecamatan Cimanggis, PO.BOX 38, Depok 16953
2	PT Aqua Golden Mississippi	Consumer Goods	0.0024%	312	312,000	Rp312,000	Rp -	Rp312,000	Aktif	Nilai nominal saham berdasarkan surat Presiden Direktur PT Aqua GM No. 106/PD/AGM/XI/2021 tanggal 30 November 2021	Cyber 2 building, 12th floor, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta 12950
3	PT Kabelindo Murni, Tbk (KBLM	Manufaktur Kabel	6.24%	69,882,400	254	Rp17,051,305,600	Rp 1,677,177,600	Rp18,728,483,200	Aktif	Nilai per lembar saham per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai pada Bursa Efek Indonesia	Cyber Kawasan Industri Pulo Gadung Jl. Rawagirang No.2 Jakarta 2 building, 12th floor, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta 12950
4	PT Permadani Khatulistiwa Nu	Perhotelan		1,218	-	Rp -	Rp -	Rp -	Aktif		
5	PT Sarana Maluku Ventura		0.00%	-	-	Rp -	Rp -	Rp -	-	Pada laporan TW 3 tercatat Nilai nominal saham berdasarkan surat Direktur Utama PT Sarana Maluku Ventura No 052/SMV/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020. Setelah ditelusuri, lembar saham merupakan saham yang berasal dari BDL. Saham SMV yang berasal dari eks BPPN hanya sejumlah 63.106, tercatat pada data saham	Jalan Jend Sudirman, hative kecil, Kompleks Pondok Permai (Aster) RT.004/RW.05,Kecamatan Sirimau Kota Ambon 97128
Total						**Rp 17,051,617,600**	**Rp 1,677,177,600**	**Rp 18,728,795,200**			
Total Aset Saham Eks BPPN						**Rp 58,284,006,532**	**Rp (1,650,786,092)**	**Rp 56,633,220,440**			

Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA (Persero)

Nilai Aset properti Eks Kelolaan PT PPA (Persero) yang disajikan dalam Neraca	Saldo Per 31 Desember 2022		Mutasi Semester I 2023		Saldo Per 31 Desember 2023	
U	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
AT	230	2,291,878,250,688	(15)	(340,662,104,261)	215	1,951,216,146,427
BS	941	1,751,893,916,355	(52)	134,590,551,662	889	1,886,484,468,017
BT	279	963,954,085,344	(25)	(34,124,207,000)	254	929,829,878,344
BD (Dokumen berupa Covernote)	28	174,129,254,000	-	93,836,153,000	28	267,965,407,000
			-	-		
JUMLAH	**1,478**	**5,181,855,506,388**	**(92)**	**(146,359,606,600)**	**1,386**	**5,035,495,899,788**
Nilai Aset properti Eks Kelolaan PT PPA (Persero) yang diungkap dalam CaLK						
BD (Dokumen berupa AJB, APHT, *Copy* Dokumen Kepemilikan, PPJB, Risalah Lelang, IMB)	543	1,702,047,726,443	(12)	(21,854,682,000)	531	1,680,193,044,443
JUMLAH	**543**	**1,702,047,726,443**	**(12)**	**(21,854,682,000)**	**531**	**1,680,193,044,443**
JUMLAH TOTAL	**2,021**	**6,883,903,232,831**	**(104)**	**(168,214,288,600)**	**1,917**	**6,715,688,944,231**

Surat Berharga Eks Kelolaan PT PPA

No.	Emiten	Jenis Surat Berharga	Nilai Aset Per 31 Des 2022 (Audited)* (Rupiah)	Nilai Aset Per 31 Desember 2023 (Rupiah)	Asal Bank	CUR	ATK Value (Nominal Value)	Total Nominal Value (Rupiah) Per 31 Desember 2022
1.	Dharmala Intiutama (0016060906)	Obligasi	2,793,450,000	2,793,450,000	Various	USD	22,000,000	343,024,000,000
2.	Ometraco Multi Artha (0016060794)	Obligasi	6,499,457,694	6,499,457,694	BII	USD	15,356,073	239,431,882,732
3.	Ongko Intl Fin (290304)	Obligasi	4,317,150,000	4,317,150,000	BALI	USD	30,000,000	467,760,000,000
4.	Ongko Intl Fin CO BV (0016037876)	Obligasi	215,857,500	215,857,500	ASPAC	USD	1,500,000	23,388,000,000
5.	Pacific Intl CP (0016062464)	Obligasi	507,900,000	507,900,000	TAMARA	USD	2,000,000	31,184,000,000
6.	Pacific Intl CP (0016062504)	Obligasi	507,900,000	507,900,000	TAMARA	USD	2,000,000	31,184,000,000
7.	Indonesia Bermuda	Reksadana	1,805,657,589	1,805,657,589	Danamon	USD	1,000,000	15,592,000,000
8.	Mulia Keramik I/97 – Mulia Ind Wrt SRA-SL (ID4000007408)	Warrants	4,934,713	4,934,713	Various	IDR	4,934,713	4,934,713
9.	Mulia Keramik I/97 – Mulia Ind Wrt SRA-SL (ID4000007507)	Warrants	4,934,713	4,934,713	Various	IDR	4,934,713	4,934,713
Total			**16,657,242,209**	**16,657,242,209**	**-**	**-**	**83,725,499**	**1,151,573,752,158**

Aset Saham Eks Kelolaan PT PPA

No.	Nama Emiten	Bank Asal	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2022	Nilai Per 31 Desember 2023	Mutasi	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten	Keterangan
1	PT Asuransi Jiwa Intan Life	Intan		n/a	223,500	223,500	-	Dicabut ijin usahanya tahun 2007	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	1. Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-425/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan tidak tercatat sebagai badan hukum
2	PT Bunas Multifinance	BUN	750,000	15.00%	75,000,000	75,000,000	-	Dicabut ijin usahanya tahun 2006	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	Surat Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK No: 1169/NB.111/2021 tgl 5 April 2021. Izin usaha sebagai Perusahaan pembiayaan telah dicabut melalui KEP-017/KM.12/2006 tanggal 12 Juli
3	PT Danaloka Pratama	BDNI	380	14.29%	141,550,000	141,550,000	-	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	1. Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melaluiSurat Nomor S-426/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 2. Surat Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK No:
4	PT Pama Indonesia Ltd	BDNI	1,500	15.00%	28,310,000	28,310,000	-	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	1. Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-427/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum namun
5	PT Pama Ventura Indonesia	BDNI	200	20.00%	234,871	234,871	-	Dicabut ijin usahanya tahun 2006	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	1. Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-447/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum namun
6	PT Servitia Finance	BUS	24,750	99.00%	1,500,000,000	1,500,000,000	-	Dicabut ijin usahanya tahun 2006	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	Surat Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK No: 1169/NB.111/2021 tgl 5 April 2021. Izin usaha sebagai Perusahaan pembiayaan telah dicabut melalui KEP-024/KM.12/2006 tanggal 12 Juli
7	PT Aplikanusa Lintasarta	19 Bank	400	0.32%	400,540,829	400,540,829	-	Aktif	Sesuai Surat Yayasan Perbanas Nomor 13/Keu/YP/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021	Jalan MH. Thamrin Kav. 3, Kebon Sirih, Menteng, Gedung Menara Thamrin Lt. 19, RT.10/RW.10, Kb. Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, 10250	Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Surat Nomor S-448/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan masih aktif beroperasi
8	PT Bhakti Sarana Ventura	BDNI	450	5.43%	385,154,000	385,154,000	-	Dicabut ijin usahanya tahun 2013	Sesuai KMK No. 153/KMK.06/2007	-	1. Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui
9	PT Dbs Securities Indonesia	BDNI	330	15.00%	-	-	-	Telah Likuidasi Tahun 2012	-	-	Surat Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK No:
10	PT Sarana Jambi Ventura	BDNI	208,179	2.31%	208,179,000	208,179,000	-	Aktif	nilai berdasar surat Direktur Utama SJV no: 04/DIR/SJV/XII/2021 tgl 6-12-21	Jalan Kapten Pattimura No. 119 Jambi - 36129, Phone : (0741) 668388, 668389, Fax : (0741) 668 390	-
11	PT Sarana Kalbar Ventura	BDNI-BNN	551,793	3.67%	551,793,000	551,793,000	-	Aktif	Nilai berdasar surat surat Dirut Kalbar ventura No.172/SK V/07/2022 tgl 8 Juli 22. nilai buku Rp1.791. nilai pasar Rp1.000	Jalan M Sohor No. 9 AB, Pontianak 78121. Phone : (0561) 736 613, Fax (0561) 746 883	-
12	PT Sarana Kalsel Ventura	BDNI	193	1.04%	193,066,000	193,066,000	-	Aktif	Nilai saham Surat 114/SKV-L/Kopr/VII/2022 tgl 13 Juli 2022 rincian jumlah kepemilikan saham PT Sarana Kalbar Ventura thn buku 2021 nilai buku Rp2.316. nilai nominal Rp1.000	Jalan Pramuka No.4, Banjarmasin. Phone (0511) 327 3208, 327 3209, Fax (0511) 325 4252	1. saham per 31 des 2020 tercatat 207.861.000 (207.861 lembar) sesuai surat 180/SKV-L/Kopr/XI/2020tanggal 5 Nop 2020, ada pembagian dividen saham sebanyak 14.795 lembar saham. 2. Sesuai Surat Kalsel Ventura Nomor 051/SKV-L/Korp/III/2021 tanggal 15 Maret 2021, tambahan dividen saham Kemenkeu (14.795 lembar) belum dicatatkan pada sistem AHU karena data belum terverifikasi (belum menyerahkan NPWP an Menkeu), sehingga jumlah saham masih tercatat sebanyak 193.066 lembar
13	PT Sarana Maluku Ventura	BNN	63,106	1.33%	63,106,000	63,106,000	-	Aktif	Nilai nominal berdasar surat Direktur Utama PT Sarana Maluku Ventura Nomor 052/SMV/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020. Dikonfirmasi melalui email per tanggal 27-7-2021 mengenai aset saham per 30 Juni 2021	Jalan Jend Sudirman, hative kecil, Kompleks Pondok Permai (Aster) RT.004/RW.05,Kecamatan Sirimau Kota Ambon 97128	
14	PT Sarana Bersama Pengembangan Indonesia	20 Bank	1,115	16.64%	-	-	-	Likuidasi	Nilai Buku saham per 31-12-2019 berdasarkan Laporan Keuangan PT SBPI Tahun 2018 (unaudited).	Setiabudi 2 Building, Suite 502A Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan, Jakarta Selatan, 12920Phone : (021) 521 0715, 521 0732, 521 0799, Fax : (021) 521 0755	Telah dilikuidasi dengan nilai likuidasi sebesar Rp3.365.184.715 yang diterima oleh DJKN pada November 2020. Nilai mutasi dicatat sebesar Rp4.038.531.683,65 sehingga terdapat selisih Rp673.346.969 yang dicatat sebagai dampak kumulatif pengurang ekuitas
15	PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri	BUN HASAN	4,500	1.04%	4,500,000,000	4,500,000,000	-	Aktif	Sesuai surat Dirut AJTM S1143/AJTM/DIR/0321 tanggal 18 Maret 2021	Tamansari Parama Boutique Office Lantai 11. Jalan KH Wahid Hasyim No. 84-88, Jakarta 10430	
16	PT Asuransi Putra Mandiri	BUN HASAN	1,800,000	25.71%	335,020,000	335,020,000	-	Dicabut ijin usahanya tahun 2011, berdasarkan surat Keputusan Ketua Bapepem-LK atas nama Menteri Keuangan Nomor : KEP-546/KM.11/2011 tanggal 11 Juli 2011	Sesuai Ralat KMK No. 155/KMK.06/200	-	Surat Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK No: 1169/NB.111/2021 tgl 5 April 2021. Izin usaha sebagai Perusahaan pembiayaan telah dicabut melalui KEP-546/KM.11/2011 tanggal 11 Juli 2011 karena sanksi
17	PT Sarana Sulut Ventura	BNN	61,553	1.44%	61,553,000	61,553,000	-	Aktif	Nilai buku saham dan pasar berdasarkan surat Direktur PT Sarana Sulut Ventura Nomor 002/SSV/I/2022 tanggal 10 Januari 2022	Kompleks Pasar Segar Blok RC-17 Paal Dua Jalan Yos Sudarso Manado	-
18	PT Sarana Sumbar Ventura	BNN	1,056,056	3.72%	1,056,056,000	1,056,056,000	-	Aktif	Berdasar Surat dirut SSV No. 05/SSBV-DIR/VII/2022 tgl 12 Juli 2022. surat 07/DIR-SSBV/II/2022 tgl 25-2-2022 kenaikan lembar saham akibat	Gedung Rangkiang Ventura. Jalan Khatib Sulaiman No.9 Kav. 5 s/d 7 Padang - Sumatera Barat.	-
19	PT Sarana Papua Ventura (d.h PT Sarana Irian Ventura)	BNN	82,471	1.41%	82,471,000	82,471,000	-	Aktif	Nilai per 30-6-21 berdasar surat Dirut SPV No.44/ADM-SPV/VII/2021 tgl 27-7-2021	Jl.Abe Tasangkapura No. 58, RT001/ RW.011, Kelurahan Ardipura, Japsel. Jayapura-Papua. Telp: 0967-5162490	-

No.	Nama Emiten	Bank Asal	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2022	Nilai Per 31 Desember 2023	Mutasi	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten	Keterangan
20	PT SMBC Indonesia Finance	BDNI	3,750,000	15.00%	3,750,000,000	3,750,000,000	-	Dicabut ijin usahanya tahun 2010	Sesuai Lampiran Surat Menteri Keuangan No. S-171/MK.6/2007 tanggal 29 Juni 2007	-	Surat Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK No: 1169/NB.111/2021 tgl 5 April 2021. Izin usaha sebagai Perusahaan pembiayaan telah dicabut melalui KEP-546/KM.10/2010 tanggal 20
21	PT Asia Natural Resources Tbk	-	22,006,500	0.97%	1,100,325,000	1,100,325,000	-	Aktif (Delisting dari BEI)	berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Mei 2022		Pada tahun 2016, aset saham PT Asia tidak diserahkelolakan kembali kepada PT PPA dan dicatat sebagai aset saham eks kelolaan PT PPA
22	PT Jembo Cable Company Tbk	-	654,500	0.43%	3,233,230,000	2,061,675,000	(1,171,555,000)	Aktif	berdasarkan nilai pasar saham per tanggal 31 Desember 2022		Pada tahun 2016, aset saham PT Jemblo Cable tidak diserahkelolakan kembali kepada PT PPA dan dicatat sebagai aset saham eks kelolaan
23	PT Sukapraja Estetika Padang Golf	-	57	13.87%	1,425,000,000	1,425,000,000	-	Aktif	Nilai buku saham berdasarkan surat Direktur PT Sukapraja Estetika Padang Golf Nomor 204/SEPG/DIR/OSW/XI/2021 tanggal 30 November 2021	Jl. Raya Otonomi, Pasar Kemis Tangerang 15560	Aset saham PT SEPG direklasifasi dari akun aset saham eks BPPN ke aset saham eks kelolaan PT PPA. Berdasarkan laporan keuangan perseroan tahun buku 2015, diketahui terdapat pencatatan Pinjaman Subordinasi perseroan kepada Kementerian Keuangan cq. DJKN dh. PT PPA (Persero)
24	PT Bima Prima Perdana (Grup Texmaco)	-		100.00%	-	-	-	Tidak Aktif			
25	PT Sejahtera Eka Graha	-	273,000	96.53%	-	-	-	Aktif	Berdasarkan Lampiran A-1 Perjanjian Pengelolaan Aset Tahun 2017	Kawasan Bogor Raya, Bogor	Telah diserahkan pengelolaannya kepada Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan BA 999.03 Aset Investasi sesuai Surat Perintah Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor PRIN-25.1/KN/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan Berita Acara Serah Terima tentang Pengelolaan Aset
Total					**19,090,812,200**	**17,919,257,200**	**(1,171,555,000)**				

NILAI PASAR ATAS ABMA/T YANG BELUM DAPAT DILUNASI/DISELESAIKAN

No	Nama Aset	Nilai Pasar Aset	Keterangan
1	ABMA/T Perumahan di Jl. Pelita RT.006/09 DKI Jakarta	Rp1.047.674.100,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-517/MK.6/2019 tanggal 25 Juli 2019. Besaran kompensasi sebesar 100% senilai Rp1.047.674.100,00
2	ABMA/T SMA Muhammadiyah 3 Genteng Jawa Timur	Rp2.663.674.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-468/MK.6/2012 Tanggal 10 Agustus 2012. Besaran kompensasi sebesar 50% senilai Rp1.331.837.000,00
3	ABMA/T Yayasan Perguruan Nasional SD Swasta Letjen Jamin Ginting's Berastagi (dh. SD Letjen Jamin Ginting) Sumatera Utara	Rp1.298.458.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-535/MK.6/2013 Tanggal 31 Desember 2013. Besaran kompensasi sebesar 50% senilai Rp649.229.000,00
4	ABMA/T Yayasan Perguruan Nasional TK Swasta Letjen Jamin Ginting's Berastagi (dh. TK Letjen Jamin Ginting) Sumatera Utara	Rp1.075.620.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-540/MK.6/2013 Tanggal 31 Desember 2013. Besaran kompensasi sebesar 50% senilai Rp537.810.000,00
5	ABMA/T Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Veteran Palopo (dh. Sekolah Tinggi Sospol Veteran RI) Sulawesi Selatan	Rp5.965.472.000,00	Surat Menteri Keuangan S-512/MK.6/2022 tanggal 07 Oktober 2022. Besaran Kompensasi 35%+10% sebesar Rp2.296.706.720,00
6	ABMA/T Home Industry Atas Nama Iwan Jakarta Pusat DKI Jakarta	Rp2.334.060.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-410/MK.6/2016 Tanggal 15 Desember 2016. Besaran kompensasi sebesar 100% senilai Rp2.334.060.000,00
7	ABMA/T Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Kebumen (dh. Kantor DPD Golkar) Kebumen Jawa Tengah	Rp4.116.771.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.6/2017 tanggal 9 Februari 2017. Besaran kompensasi sebesar 100% senilai Rp4.116.771.000,00
8	ABMA/T SMK Yayasan Pendidikan Teknologi Pangkalan Susu (dh. ST dan STM) Sumatera Utara	Rp427.798.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-512/MK.6/2022 tanggal 07 Oktober 2022. Besaran Kompensasi 35%+10% sebesar Rp2.296.706.720,00
9	ABMA/T Rumah Nyoman Sidharta Suryanata Grogol Petamburan Provinsi DKI Jakarta	Rp1.469.468.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-288/MK.6/2017 tanggal 14 November 2017.Besaran Kompensasi sebesar 100% senilai Rp1.469.468.000,00
10	SD Al Wasliyah dan SMA Teladan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara	Rp743.560.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-193/MK.6/2018 tanggal 16 Mei 2018. Besaran kompensasi sebesar 50% senilai Rp371.780.000,00
11	ABMA/T Yayasan Pendidikan Angkatan 45	Rp4.144.299.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-496/MK.6/2019 tanggal 22 Juli 2019 kompensasi 50% senilai Rp2.072.149.500,00
12	ABMA/T Rumah Sakit Bersalin Sentosa Jl. Jenderal Sudirman No. 52 Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar	Rp4.373.822.000,00	Surat Menteri Keuangan kepada Gubernur Sulawesi Selatan u.p. Sekretaris Daerah Nomor S-4514/A/2001 tanggal 12 November 2001, Surat Kepala Kanwil XXIII Ditjen Anggaran Makasar Nomor S-1349/W.A.23/ BD.05/2002 tanggal 19 Juni 2002 Besaran Kompensasi senilai Rp2.186.911.000,00
13	ABMA/T Rumah Tinggal di Jalan Sumatera Nomor 27 (d.h 13-15), Bandung	Rp7.503.853.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-243/MK.6/2020 tanggal 22 Juni 2020 Kompensasi 100% senilai Rp7.503.853.000
14	ABMA/T Rumah Tinggal a.n Sudjanto (d.h Rumah Tinggal Penampungan)	Rp167.368.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-627/MK.6/2022 tanggal 13 Desember 2022 kompensasi 100% senilai Rp167.368.000,00
15	ABMA/T Rumah Tinggal a.n Suherman Khouw (d.h Rumah Tinggal Penampungan)	Rp15.953.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-612/MK.6/2022 tanggal 27 November 2022 kompensasi 100% senilai Rp15.953.000,00
16	ABMA/T Rumah Tinggal a.n Jimmy Hartono (d.h Rumah Tinggal Penampungan)	Rp22.842.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-611/MK.6/2022 tanggal 27 November 2022 kompensasi 100% senilai Rp22.842.000,00
17	ABMA/T Rumah Tinggal a.n Budiyanto (d.h Rumah Tinggal Penampungan)	Rp16.920.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-610/MK.6/2022 tanggal 27 November 2022 kompensasi 100% senilai Rp16.920.000,00

No	Nama Aset	Nilai Pasar Aset	Keterangan
18	ABMA/T Rumah Tinggal a.n Liong Mung Kian (d.h Rumah Tinggal Penampungan)	Rp18.733.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-609/MK.6/2022 tanggal 27 November 2022 kompensasi 100% senilai Rp18.733.000,00
19	ABMA/T Gereja Katolik St. Petrus Stasi Sangking (d.h Tanah Kosong)	Rp10.433.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.6/2022 tanggal 13 Desember 2022 kompensasi 0% senilai Rp0,00
20	ABMA/T Rumah Tinggal a.n Lie Jun (d.h Rumah Tinggal Penampungan)	Rp35.569.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-628/MK.6/2022 tanggal 13 Desember 2022 kompensasi 100% senilai Rp35.569.000,00
21	ABMA/T Rumah Tinggal a.n Lie Bun Fan (d.h Rumah Tinggal Penampungan)	Rp24.171.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-635/MK.6/2022 tanggal 14 Desember 2022 kompensasi 100% senilai Rp24.171.000,00
22	ABMA/T Rumah Tinggal a.n Nyuk Min (d.h Rumah Tinggal Penampungan)	Rp37.344.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-631/MK.6/2022 tanggal 13 Desember 2022 kompensasi 100% senilai Rp37.344.000,00
23	ABMA/T Rumah Tinggal a.n Wie Lim (d.h Rumah Tinggal Penampungan)	Rp37.131.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-626/MK.6/2022 tanggal 13 Desember 2022 kompensasi 100% senilai Rp37.131.000,00
24	ABMA/T Rumah Tinggal a.n Fie Sian (d.h Rumah Tinggal Penampungan)	Rp22.237.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-625/MK.6/2022 tanggal 13 Desember 2022 kompensasi 100% senilai Rp22.237.000,00
25	ABMA/T Rumah Tinggal a.n Cham A Moi (d.h Rumah Tinggal Penampungan)	Rp19.337.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-632/MK.6/2022 tanggal 13 Desember 2022 kompensasi 100% senilai Rp19.337.000,00
26	ABMA/T Rumah Tinggal a.n Lie Ki Sang (d.h Rumah Tinggal Penampungan)	Rp18.733.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-608/MK.6/2022 tanggal 27 November 2022 kompensasi 100% senilai Rp18.733.000,00
27	ABMA/T Rumah Tinggal a.n Arim (d.h Kantor Kepala Desa/Kebun PKK)	Rp57.463.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-633/MK.6/2022 tanggal 13 Desember 2022 kompensasi 100% senilai Rp57.463.000,00
		Rp37.668.763.100,00	

NILAI PASAR ATAS ABMA/T YANG DITETAPKAN BESARAN KOMPENSASINYA

No	Nama Aset	Nilai Pasar Aset	Keterangan
1	ABMA/T Yayasan Pendidikan Swadaya Pangkalpinang (d.h SD/SMP/SMA Swadaya Pangkalpinang) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Rp3,068,785,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-299/MK.6/2023 tanggal 20 Maret 2023 kompensasi 35% senilai Rp1.074.074.750,00.
2	ABMA/T Klenteng Budhi Bandar Tnggi (d.h Klenteng) di Provinsi Sumatera Utara	Rp31,528,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-304/MK.6/2023 tanggal 21 Maret 2023 kompensasi 0% senilai Rp0,00
3	ABMA/T Yayasan Pendidiakan Bakti Jebus (d.h SD/SMP Bhakti) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Rp1,363,922,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-231/MK.6/2023 tanggal 5 Maret 2023 kompensasi 30% senilai Rp409.176.600,00
4	ABMA/T Rumah Tinggal Suriansyah (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	Rp120,453,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-360/MK.6/2023 tanggal 14 Mei 2023 dan S-368/MK.6/2023 tanggal 5 Juni 2023 kompensasi 100%+10% senilai Rp132.498.300,00
5	ABMA/T Tempat Tinggal SJ Asthary PK (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	Rp113,357,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-432/MK.6/2023 tanggal 4 Juli 2023 kompensasi 100%+10% senilai Rp124.692.700,00
6	ABMA/T Tempat Tinggal S Prawirawidjaja / Subianto (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	Rp113,357,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-433/MK.6/2023 tanggal 4 Juli 2023 kompensasi 100%+10% senilai Rp124.692.700,00
7	ABMA/T Tempat Tinggal Hartani Bakti (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	Rp98,135,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-434/MK.6/2023 tanggal 4 Juli 2023 kompensasi 100% senilai Rp98.135.000,00
8	ABMA/T Tempat Tinggal H.M Syakhril (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	Rp108,785,000.00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-479/MK.6/2023 tanggal 6 Juli 2023 kompensasi 100% senilai Rp108.785.000,00
		Rp5,018,322,000.00	

DAFTAR ABMA/T YANG TELAH DITERBITKAN KMK

No.	Nama Aset	Nilai Aset	Keterangan
1	Rumah Tinggal (d.h Rumah Tinggal Penampungan) Luas Tanah 189m^2 di Jalan Sudirman (d.h Jalan Raya Mempawah), Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah (d.h Pontianak), Provinsi Kalimantan Barat (Pihak Ketiga atas nama Jimmy Hartono)	Rp22,842,000.00	KMK-5/KM.6/2023 tanggal 18 Januari 2023 Besaran kompensasi sebesar 100% dari nilai wajar aset
2	Rumah Tinggal (d.h Rumah Tinggal Penampungan) Luas Tanah 140m^2 di Jalan Sudirman (d.h Jalan Raya Mempawah), Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah (d.h Pontianak), Provinsi Kalimantan Barat (Pihak Ketiga atas nama Budiyanto)	Rp16,920,000.00	KMK-6/KM.6/2023 tanggal 18 Januari 2023 Besaran kompensasi sebesar 100% dari nilai wajar aset
3	Rumah Tinggal (d.h Rumah Tinggal Penampungan) Luas Tanah 155 m^2 di Jalan Sudirman (d.h Jalan Raya Mempawah), Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah (d.h Pontianak), Provinsi Kalimantan Barat (Pihak Ketiga atas nama Liong Mung Kian)	Rp18,733,000.00	KMK-7/KM.6/2023 tanggal 18 Januari 2023 Besaran kompensasi sebesar 100% dari nilai wajar aset
4	Gereja Katholik St. Petrus Stasi Sangking (d.h Tanah Kosong) Luas Tanah 750 m^2 di Jalan Raya Sangking (d.h Jalan raya Toho-Karangan), Desa Amawang, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah (d.h Kabupaten Pontianak), Provinsi Klaimantan Barat	Rp10,433,000.00	KMK-33/KM.6/2023 tanggal 13 Februari 2023 Besaran kompensasi sebesar 0% dari nilai wajar aset
5	Rumah Tinggal (d.h Rumah Tinggal Penampungan) Luas Tanah 296 m^2 di Jalan Sudirman (d.h Jalan Raya Mempawah), Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah (d.h Pontianak), Provinsi Kalimantan Barat (Pihak Ketiga atas nama Lie Jun)	Rp35,569,000.00	KMK-34/KM.6/2023 tanggal 13 Feburari 2023 Besaran kompensasi sebesar 100% dari nilai wajar aset
6	Rumah Tinggal (d.h Rumah Tinggal Penampungan) Luas Tanah 200 m^2 di Jalan Sudirman (d.h Jalan Raya Mempawah), Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah (d.h Pontianak), Provinsi Kalimantan Barat (Pihak Ketiga atas nama Lie Bun Fan)	Rp24,171,000.00	KMK-35/KM.6/2023 tanggal 13 Februari 2023 Besaran kompensasi sebesar 100% dari nilai wajar aset
7	Rumah Tinggal (d.h Rumah Tinggal Penampungan) Luas Tanah 309 m^2 di Jalan Sudirman (d.h Jalan Raya Mempawah), Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah (d.h Pontianak), Provinsi Kalimantan Barat (Pihak Ketiga atas nama Nyuk Min)	Rp37,344,000.00	KMK-36/KM.6/2023 tanggal 13 Februaari 2023 Besaran kompensasi sebesar 100% dari nilai wajar aset

No.	Nama Aset	Nilai Aset	Keterangan
8	Rumah Tinggal (d.h Rumah Tinggal Penampungan) Luas Tanah 309 m^2 di Jalan Sudirman (d.h Jalan Raya Mempawah), Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah (d.h Pontianak), Provinsi Kalimantan Barat (Pihak Ketiga atas nama Wie Lim)	Rp37,131,000.00	KMK-37/KM.6/2023 tanggal 13 Februari 2023 Besaran kompensasi sebesar 100% dari nilai wajar aset
9	Rumah Tinggal (d.h Rumah Tinggal Penampungan) Luas Tanah 184 m^2 di Jalan Sudirman (d.h Jalan Raya Mempawah), Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah (d.h Pontianak), Provinsi Kalimantan Barat (Pihak Ketiga atas nama Fie Sian)	Rp22,237,000.00	KMK-39/KM.6/2023 tanggal 17 Februari 2023 Besaran kompensasi sebesar 100% dari nilai wajar aset
10	Rumah Tinggal (d.h Rumah Tinggal Penampungan) Luas Tanah 160 m^2 di Jalan Sudirman (d.h Jalan Raya Mempawah), Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah (d.h Pontianak), Provinsi Kalimantan Barat (Pihak Ketiga atas nama Cham A Moi)	Rp19,337,000.00	KMK-40/KM.6/2023 tanggal 17 Februari 2023 Besaran kompensasi sebesar 100% dari nilai wajar aset
11	Rumah Tinggal (d.h Rumah Tinggal Penampungan) Luas Tanah 155 m^2 di Jalan Sudirman (d.h Jalan Raya Mempawah), Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah (d.h Pontianak), Provinsi Kalimantan Barat (Pihak Ketiga atas nama Lie Ki Sang)	Rp18,733,000.00	KMK-41/KM.6/2023 tanggal 17 Februari 2023 Besaran kompensasi sebesar 100% dari nilai wajar aset
12	Rumah Tinggal (d.h Kantor Kepala Desa/Kebun PKK) Luas Tanah 1.080 m^2 di Jalan Anjungan-Bengkayang (d.h Jalan Raya Toho), Desa Terap (d.h Desa Balah), Provinsi Kalimantan Barat (Pihak Ketiga atas nama Arim)	Rp57,463,000.00	KMK-42/KM.6/2023 tanggal 17 Februari 2023 Besaran kompensasi sebesar 100% dari nilai wajar aset
13	Yayasan Pendidikan Swadaya Pangkalpinang (d.h SD/SMP/SMA Swadaya Pangkalpinang) Luas Tanah 6.314 m^2 di Jalan Garut Nomor 101 (d.h Jalan Gudang Padi Nomor 16), Kelurahan Pasar Padi (d.h Kelurahan Gudang Pagi), Kecamatan Girimaya (d.h Kecamatan Pangkalpinang), Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Rp3,068,785,000.00	KMK-80/KM.6/2023 tanggal 02 Mei 2023 Besaran kompensasi sebesar 35% dari nilai wajar aset
14	Klenteng Budhi Tri Bhakti (d.h Klenteng) Luas Tanah 245,83 m^2 di Huta VII Bandar Pamujian Nagori Bandar Tinggi, Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bandar Masilam (d.h Kecamatan Bandar), Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara	Rp31,528,000.00	KMK-95/KM.6/2023 tanggal 20 Mei 2023 Besaran kompensasi sebesar 100% dari nilai wajar aset

No.	Nama Aset	Nilai Aset	Keterangan
15	Yayasan Pendidikan Bakti Jebus (d.h SD/SMP Bhakti) Luas Tanah 10.989 m^2 di Jalan Kantor Pos Dan Giro Nomor 5 (d.h Jalan Kantor Pos), Desa Parittiga (d.h Desa Puput), Kecamatan Parittiga (d.h Kecamatan Jebus), Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Rp1,363,922,000.00	KMK-123/KM.6/2023 tanggal 26 Juni 2023 Besaran kompensasi sebesar 30% dari nilai wajar aset
16	Rumah Tinggal a.n H.M.Syakhril (d.h SMA Pagatan) Luas Tanah 287 m2 di Jalan H.M. Nurung, Kelurahan Pagatan Kota, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu (d.h Kabupaten Kota Baru dan Tanah Bumbuh), Provinsi Kalimantan Selatan	Rp108,785,000.00	KMK-151/KM.6/2023 tanggal 7 Agustus 2023 Besaran kompensasi sebesar 100% dari nilai wajar aset
17	Rumah Tinggal a.n Hartani Bakti (d.h SMA Pagatan) Luas Tanah 259 m2 di Jalan H.M. Nurung, Kelurahan Pagatan Kota, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu (d.h Kabupaten Kota Baru dan Tanah Bumbuh), Provinsi Kalimantan Selatan	Rp98,135,000.00	KMK-152/KM.6/2023 tanggal 8 Agustus 2023Besaran kompensasi sebesar 100% dari nilai wajar aset
18	Yayasan Pendidikan Teknologi (YPT) Pangkalan Susu (d.h ST dan STM) Luas Tanah 1.509 m2 di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 1 (d.h Jalan Pelabuhan Pangkalan Susu), Kelurahan Beras Basah, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara	Rp427,798,000.00	KMK-227/KM.6/2023 tanggal 29 Oktober 2023 Besaran kompensasi sebesar 30% + 10% dari nilai wajar aset
		Rp5,419,866,000.00	

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA EKS BMN IDLE YANG DISERAHKAN KEPADA PENGGUNA BARANG ATAU PEMDA

No	Jenis BMN		KPKNL	Lokasi Aset		Luas (M2)	Perolehan Aset				Ket.
	Kode Barang	Uraian Barang		Kab./Kota	Alamat		Tanggal	Nilai (Rp)	Akm Penyusutan	Nilai Buku	
1	2010101004	Tanah Bangunan Rumah Negara dalam Proses Penggolongan	KPKNL Purwokerto	Kab. Kebumen	Jl. Indrakila, Kel. Panjer, Kec. Kebumen, Jawa Tengah	582	1/1/2022	803,368,000	-	803,368,000	Pada Tahun 2022 dicatat sebagai PI
TOTAL TANAH						**582**		**803,368,000**	**-**	**803,368,000**	
1	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Purwokerto	Kab. Kebumen	Jl. Indrakila, Kel. Panjer, Kec. Kebumen, Jawa Tengah	50	1/1/1978	12,800,000	9,142,857	3,657,143	
2	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Purwokerto	Kab. Kebumen	Jl. Indrakila, Kel. Panjer, Kec. Kebumen, Jawa Tengah	50	1/1/1978	12,800,000	9,142,857	3,657,143	
3	4010202013	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	KPKNL Purwokerto	Kab. Kebumen	Jl. Indrakila, Kel. Panjer, Kec. Kebumen, Jawa Tengah	36	1/1/1978	6,000,000	4,285,714	1,714,286	
4	4010202013	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	KPKNL Purwokerto	Kab. Kebumen	Jl. Indrakila, Kel. Panjer, Kec. Kebumen, Jawa Tengah	36	1/1/1978	5,700,000	4,071,428	1,628,572	
5	4010201010	Rumah Negara Golongan I Tipe D permanen	KPKNL Banjarmasin	Banjarmasin	Jl. Veteran Gg. Kenari III Nomor 5	66	1/1/1982	75,000,000	45,348,837	29,651,163	Penghapusan karena Rusak Berat
TOTAL BANGUNAN						**238**		**112,300,000**	**71,991,694**	**40,308,306**	
TOTAL						**820**		**915,668,000**	**71,991,694**	**843,676,306**	

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA EKS BMN IDLE YANG DITERIMA PENGELOLA BARANG

No	Pengelola Barang	Berita Acara Serah Terima		Identitas Aset							Ket.
		Nomor	Tanggal	Kode Barang	Uraian Barang	Lokasi Aset		Luas	Perolehan Aset		
						Kabupaten/ Kota	Alamat		Tanggal	Nilai (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	KPKNL Medan	B-415/02500/PL.800/03/2023	3/16/2023	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	Kota Medan	Jl. Cemara, Gg. Rambutan, Kel. Pulo Brayan Darat, Kec. Medan Timur, Kota Medan	471	12/11/2012	1,616,472,000	Penyerahan dari BPS
2	KPKNL Padang	BA-6/SJ.7/2023	3/10/2023	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Kota Padang	Jl. Bhakti No. 11 A-C, Kel. Parupuk Tabing, Kec. Koto Tengah, Koto Tengah, Kota Padang	621	1/1/2011	870,176,000	Penyerahan dari Kemenkeu
3	KPKNL Bandung	B-424/02500/PL.800/03/2023	3/20/2023	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	Kab. Bandung	Jl. Raya Banjaran, Kel. Baleendah, Kec. Baleendah, Kab. Bandung	150	9/3/2019	732,068,000	Penyerahan dari BPS
4	KPKNL Semarang	BA-3/SJ.7/2023	1/18/2023	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kab. Kendal	Jl. Utama Timur, Desa Penaruban, Kec. Weleri, Kab. Kendal	885	1/1/1964	2,659,868,000	Penyerahan dari Kemenkeu; sesuai BAST-001/KNL.09101/2023 dilakukan Serah Terima ke KPKNL Pekalongan
5	KPKNL Semarang	BA-16/SJ.7/2022	11/21/2022	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kab. Kendal	Jl. Raya Barat 03/03, Desa Penaruban, Kec. Weleri, Kab. Kendal	325	1/1/1964	1,151,036,000	Penyerahan dari Kemenkeu; sesuai BAST-001/KNL.09101/2023 dilakukan Serah Terima ke KPKNL Pekalongan
6	KPKNL Pamekasan	BA-2/SJ.7/2023	1/9/2023	2010104018	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	Kab. Sumenep	Jl. Pelabuhan Bintaro, Desa Longos, Kec. Gapura, Kab. Sumenep	300	1/1/1987	49,988,000	Penyerahan dari Kemenkeu
7	KPKNL Pamekasan	BA-2/SJ.7/2023	1/9/2023	2010104018	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	Kab. Sumenep	Jl. Pelabuhan Dungkek, RT. 005/RW. 003, Dungkek, Kab. Sumenep	235	1/1/1987	134,303,000	Penyerahan dari Kemenkeu
8	KPKNL Pamekasan	BA-2/SJ.7/2023	1/9/2023	2010104018	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	Kab. Pamekasan	Desa Montok, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan	253	1/1/1988	191,182,000	Penyerahan dari Kemenkeu
9	KPKNL Pamekasan	BA-2/SJ.7/2023	1/9/2023	2010104018	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	Kab. Pamekasan	Jl. Raya Pasean, Desa Batukerbuy, Kec. Pasean, Kab. Pamekasan	230	1/1/1988	244,424,000	Penyerahan dari Kemenkeu
10	KPKNL Pamekasan	BA-2/SJ.7/2023	1/9/2023	2010104018	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	Kab. Sampang	Jl. Raya Kamal, Desa Banyuanyar, Kab. Sampang	404	1/1/1988	736,189,000	Penyerahan dari Kemenkeu

No	Pengelola Barang	Berita Acara Serah Terima		Identitas Aset							Ket.
		Nomor	Tanggal	Kode Barang	Uraian Barang	Lokasi Aset		Luas	Perolehan Aset		
						Kabupaten/ Kota	Alamat		Tanggal	Nilai (Rp)	
11	KPKNL Pamekasan	BA-2/SJ.7/2023	1/9/2023	2010104018	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	Kab. Pamekasan	Jl. Raya Kamal, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan	224	1/1/1988	158,296,000	Penyerahan dari Kemenkeu
12	KPKNL Pamekasan	BA-2/SJ.7/2023	1/9/2023	2010104018	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	Kab. Sumenep	Kec. Gayam, Kab. Sumenep	325	1/1/1993	177,109,000	Penyerahan dari Kemenkeu
13	KPKNL Palu	BA-13/SJ.7/2021	8/9/2021	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kab. Banggai	Jl. Ds. Slamety Hario, Kec. Moilong, Kab. Banggai	778	1/1/1993	116,732,000	Penyerahan dari Kemenkeu
14	KPKNL Palu	BA-11/SJ.7/2022	10/4/2022	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Kab. Donggala	Jl. Pelabuhan Donggala, Kel. Boya, Kec. Banawa, Kab. Donggala	888	1/1/1975	400,000,000	Penyerahan dari Kemenkeu
15	KPKNL Palu	BA-11/SJ.7/2022	10/4/2022	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kab. Donggala	Jl. Trans Palu-Donggala, Kel. Loli Tasiburi, Kec. Banawa, Kab. Donggala	256	1/1/2004	51,200,000	Penyerahan dari Kemenkeu
16	KPKNL Palu	BA-11/SJ.7/2022	10/4/2022	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kab. Tolitoli	Jl. Trans Tolitoli-Palu, Desa Ogotua, Kec. Dampal Utara, Kab. Tolitoli	256	1/1/1979	25,600,000	Penyerahan dari Kemenkeu
17	KPKNL Batam	B-648/21000/PL.700/12/2023	12/14/2023	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kota Batam	Komplek Perkantoran Sekupang, Jl. Ir. Sutami	1,000	1/1/2017	1,702,875,000	Penyerahan dari BPS
18	KPKNL Batam	B-648/21000/PL.700/12/2023	12/14/2023	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	Kota Batam	Jl. Tiban Palapa, Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang	800	1/1/2017	974,700,000	Penyerahan dari BPS
19	KPKNL Batam	B-648/21000/PL.700/12/2023	12/14/2023	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kota Tanjung Pinang	Jl. MT Haryono KM. 3, Kota Tanjung Pinang	343	1/1/1983	591,717,000	Penyerahan dari BPS
20	KPKNL Bandar Lampung	BA-8/SJ.7/2023	5/22/2023	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kab. Lampung Tengah	Jl. Kampung Way Pegadungan, Desa Cabang, Kel. Way Seputih, Kec. Bandar Surabaya, Kab. Lampung Tengah	500	1/1/1979	43,749,000	Penyerahan dari Kemenkeu
21	KPKNL Bandar Lampung	BA-8/SJ.7/2023	5/22/2023	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kab. Lampung Selatan	Jl. Pratu Ishak, RW. 01, Kel. Kalianda, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan	131	1/1/2011	51,274,000	Penyerahan dari Kemenkeu
22	KPKNL Malang	W14-U26/1108/PL.01/VII/2023	7/13/2023	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kab.Tulungagung	Jl. Raya Jurusan Tulungagung - Blitar, Desa Buntaran, Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung	997	1/1/1982	160,000,000	Penyerahan dari Mahkamah Agung

No	Pengelola Barang	Berita Acara Serah Terima		Identitas Aset							Ket.
		Nomor	Tanggal	Kode Barang	Uraian Barang	Lokasi Aset		Luas	Perolehan Aset		
						Kabupaten/ Kota	Alamat		Tanggal	Nilai (Rp)	
23	KPKNL Metro	B-1460/02500/PL.800/12/2022	12/22/2022	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kab. Lampung Utara	Jl. Raden Intan, Kel. Kota Alam, Kec. Kota Bumi Selatan, Kab. Lampung Utara	577	1/1/1970	59,431,000	Penyerahan dari BPS
24	KPKNL Batam	BA-24/SJ.7/2021	12/6/2021	2010104001	Tanah Bangunan Kantor	Kab. Karimun	Jl. Lancang	1,241	1/1/2012	178,234,000	Penyerahan dari Kemenkeu
25	KPKNL Batam	BA-24/SJ.7/2021	12/6/2021	2010101004	Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan	Kab. Karimun	Jl. Muka Limus, Kel. Sawang, Kec.Kundur, Kab. Karimun	195	1/1/1986	241,161,000	Penyerahan dari Kemenkeu
26	KPKNL Batam	BA-25/SJ.7/2021	12/9/2021	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kab. Karimun	Jl. KP Tengah Timur, Kel. Moro, Kec. Moro, Kab. Karimun	135	1/1/2012	30,041,000	Penyerahan dari Kemenkeu
TOTAL TANAH								**12,520**		**13,347,825,000**	

No	Pengelola Barang	Berita Acara Serah Terima		Identitas Aset							Ket.
		Nomor	Tanggal	Kode Barang	Uraian Barang	Lokasi Aset		Luas	Perolehan Aset		
						Kabupaten/ Kota	Alamat		Tanggal	Nilai (Rp)	
1	KPKNL Medan	B-415/02500/PL.800/03/2023	3/16/2023	4010201010	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	Kota Medan	Jl. Cemara, Gg. Rambutan No. 33, Kel. Pulo Brayan Darat, Kec. Medan Timur, Kota Medan	74	1/11/2017	249,178,000	Penyerahan dari BPS
2	KPKNL Medan	B-415/02500/PL.800/03/2023	3/16/2023	4010201010	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	Kota Medan	Jl. Cemara, Gg. Rambutan No. 31, Kel. Pulo Brayan Darat, Kec. Medan Timur, Kota Medan	74	1/11/2017	245,144,000	Penyerahan dari BPS
3	KPKNL Medan	B-415/02500/PL.800/03/2023	3/16/2023	4010201010	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	Kota Medan	Jl. Cemara, Gg. Rambutan No. 29, Kel. Pulo Brayan Darat, Kec. Medan Timur, Kota Medan	74	1/11/2017	249,317,000	Penyerahan dari BPS
4	KPKNL Semarang	BA-16/SJ.7/2022	11/21/2022	4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Kab. Kendal	Jl. Raya Barat 03/03, Desa Penaruban, Kec. Weleri, Kab. Kendal	150	1/1/2002	7,000,000	Penyerahan dari Kemenkeu; sesuai BAST-001/KNL.09101/2023 dilakukan Serah Terima ke KPKNL Pekalongan
5	KPKNL Pamekasan	BA-2/SJ.7/2023	1/9/2023	4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Kab. Sumenep	Jl. Pelabuhan Bintaro, Desa Longos, Kec. Gapura, Kab. Sumenep	70	1/1/1987	16,124,493	Penyerahan dari Kemenkeu
6	KPKNL Pamekasan	BA-2/SJ.7/2023	1/9/2023	4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Kab. Sumenep	Jl. Pelabuhan Dungkek, RT. 005/RW. 003, Dungkek, Kab. Sumenep	70	1/1/1987	18,815,681	Penyerahan dari Kemenkeu
7	KPKNL Pamekasan	BA-2/SJ.7/2023	1/9/2023	4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Kab. Pamekasan	Desa Montok, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan	70	1/1/1988	16,567,169	Penyerahan dari Kemenkeu
8	KPKNL Pamekasan	BA-2/SJ.7/2023	1/9/2023	4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Kab. Sampang	Jl. Raya Kamal, Desa Banyuanyar, Kab. Sampang	70	1/1/1988	20,308,000	Penyerahan dari Kemenkeu
9	KPKNL Pamekasan	BA-2/SJ.7/2023	1/9/2023	4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Kab. Sumenep	Kec. Gayam, Kab. Sumenep	70	1/1/1993	14,275,450	Penyerahan dari Kemenkeu
10	KPKNL Palu	BA-13/SJ.7/2021	8/9/2021	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kab. Banggai	Jl. Ds. Slamet Hario, Kec. Moilong, Kab. Banggai	70	1/1/1990	106,707,000	Penyerahan dari Kemenkeu

No	Pengelola Barang	Berita Acara Serah Terima		Identitas Aset							Ket.
		Nomor	Tanggal	Kode Barang	Uraian Barang	Lokasi Aset		Luas	Perolehan Aset		
						Kabupaten/ Kota	Alamat		Tanggal	Nilai (Rp)	
11	KPKNL Batam	B-648/21000/PL.700/12/2023	12/14/2023	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kota Batam	Komplek Perkantoran Sekupang, Jl. Ir. Sutami	150	1/1/1986	148,346,000	Penyerahan dari BPS
12	KPKNL Batam	B-648/21000/PL.700/12/2023	12/14/2023	4040104001	Pagar Permanen	Kota Batam	Jl. Tiban Palapa, Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang	0	1/1/2009	56,592,000	Penyerahan dari BPS
13	KPKNL Batam	B-648/21000/PL.700/12/2023	12/14/2023	4010201010	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	Kota Batam	Jl. Tiban Palapa, Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang	50	1/1/1997	49,343,000	Penyerahan dari BPS
14	KPKNL Batam	B-648/21000/PL.700/12/2023	12/14/2023	4010201010	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	Kota Batam	Jl. Tiban Palapa, Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang	50	1/1/1997	49,343,000	Penyerahan dari BPS
15	KPKNL Batam	B-648/21000/PL.700/12/2023	12/14/2023	4010201010	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	Kota Batam	Jl. Tiban Palapa, Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang	50	1/1/1997	49,343,000	Penyerahan dari BPS
16	KPKNL Batam	B-648/21000/PL.700/12/2023	12/14/2023	4010201010	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	Kota Batam	Jl. Tiban Palapa, Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang	50	1/1/1997	49,343,000	Penyerahan dari BPS
17	KPKNL Batam	B-648/21000/PL.700/12/2023	12/14/2023	4010101999	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	Kota Tanjung Pinang	Jl. MT Haryono KM. 3, Kota Tanjung Pinang	167	1/1/1975	150,090,000	Penyerahan dari BPS
18	KPKNL Bandar Lampung	BA-8/SJ.7/2023	5/22/2023	4010101002	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Kab. Lampung Selatan	Jl. Pratu Ishak, RW. 01, Kel. Kalianda, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan	100	1/1/2011	20,918,023	Penyerahan dari Kemenkeu
19	KPKNL Malang	W14-U26/1108/PL.01/VII/2023	7/13/2023	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kab.Tulungagung	Jl. Raya Jurusan Tulungagung - Blitar, Desa Buntaran, Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung	250	1/1/1982	64,000,000	Penyerahan dari Mahkamah Agung
20	KPKNL Batam	BA-24/SJ.7/2021	12/6/2021	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kab. Karimun	Jl. Lancang Kuning, Kel. Buru, Kec. Karimun, Kab.	857	1/1/2012	2,116,954,574	Penyerahan dari Kemenkeu
21	KPKNL Batam	BA-24/SJ.7/2021	12/6/2021	4010101003	Bangunan Gedung Kantor Darurat	Kab. Karimun	Jl. Muka Limus, Kel. Sawang, Kec.Kundur, Kab. Karimun	27	1/1/1986	9,199,000	Penyerahan dari Kemenkeu
22	KPKNL Batam	BA-24/SJ.7/2021	12/6/2021	4010202015	Rumah Negara Golongan II Tipe E Darurat	Kab. Karimun	Jl. Lancang Kuning, Kel. Buru, Kec. Karimun, Kab.	36	1/1/2012	18,026,000	Penyerahan dari Kemenkeu
23	KPKNL Batam	BA-25/SJ.7/2021	12/9/2021	4010202015	Rumah Negara Golongan II Tipe E Darurat	Kab. Karimun	Jl. KP Tengah Timur, Kel. Moro, Kec. Moro, Kab. Karimun	36	1/1/2012	74,872,000	Penyerahan dari Kemenkeu
TOTAL BANGUNAN								**2,615**		**3,799,806,390**	
TOTAL										**17,147,631,390**	

RINCIAN UTANG PAJAK ROKOK
TAHUN 2023

No	Daerah	Utang PR (Penerimaan Bulan Desember 2023 & Tambahan Penerimaan bulan Oktober dan November 2023)	Utang per Pemda periode TW 1 s.d. TW 4 2023 yang Belum Disalurkan di TA 2023*	Total Utang Pajak Rokok TA 2023
1	Provinsi Aceh	65,113,173,270	-	65,113,173,270
2	Provinsi Sumatera Utara	185,238,617,651	-	185,238,617,651
3	Provinsi Sumatera Barat	68,068,789,217	-	68,068,789,217
4	Provinsi Riau	80,441,005,850	-	80,441,005,850
5	Provinsi Kepulauan Riau	25,430,925,376	-	25,430,925,376
6	Provinsi Jambi	44,088,222,297	-	44,088,222,297
7	Provinsi Sumatera Selatan	104,650,512,400	-	104,650,512,400
8	Provinsi Bangka Belitung	17,820,728,083	-	17,820,728,083
9	Provinsi Bengkulu	24,776,094,615	26,300,180,196	51,076,274,811
10	Provinsi Lampung	107,735,315,364	-	107,735,315,364
11	Provinsi DKI Jakarta	136,153,300,181	-	136,153,300,181
12	Provinsi Jawa Barat	588,653,943,105	-	588,653,943,105
13	Provinsi Banten	146,992,422,511	-	146,992,422,511
14	Provinsi Jawa Tengah	453,719,193,347	-	453,719,193,347
15	Provinsi DI Yogyakarta	44,508,909,155	-	44,508,909,155
16	Provinsi Jawa Timur	497,965,080,930	-	497,965,080,930
17	Provinsi Kalimantan Barat	66,348,994,621	-	66,348,994,621
18	Provinsi Kalimantan Tengah	32,348,675,902	-	32,348,675,902
19	Provinsi Kalimantan Selatan	50,124,816,672	-	50,124,816,672
20	Provinsi Kalimantan Timur	47,102,900,699	-	47,102,900,699
21	Provinsi Kalimantan Utara	8,588,503,920	-	8,588,503,920
22	Provinsi Sulawesi Utara	32,246,079,092	-	32,246,079,092
23	Provinsi Gorontalo	14,571,010,158	-	14,571,010,158
24	Provinsi Sulawesi Tengah	37,216,099,938	-	37,216,099,938
25	Provinsi Sulawesi Selatan	112,024,169,403	-	112,024,169,403
26	Provinsi Sulawesi Barat	17,515,237,218	-	17,515,237,218
27	Provinsi Sulawesi Tenggara	32,566,541,321	75,425,344,060	107,991,885,381
28	Provinsi Bali	51,887,734,122	-	51,887,734,122
29	Provinsi Nusa Tenggara Barat	66,245,647,428	-	66,245,647,428
30	Provinsi Nusa Tenggara Timur	66,738,346,909	-	66,738,346,909
31	Provinsi Maluku	22,835,082,078	-	22,835,082,078
32	Provinsi Maluku Utara	16,186,114,133	60,294,533,890	76,480,648,023
33	Provinsi Papua	12,545,543,152	-	12,545,543,152
34	Provinsi Papua Barat	6,753,138,139	-	6,753,138,139
35	Provinsi Papua Selatan	6,246,036,133	23,266,970,331	29,513,006,464
36	Provinsi Papua Tengah	16,298,877,430	17,301,492,430	33,600,369,860
37	Provinsi Papua Pegunungan	17,642,439,349	40,860,558,229	58,502,997,578
38	Provinsi Papua Barat Daya	7,298,739,668	27,188,372,864	34,487,112,532
	Total	**3,332,686,960,837**	**270,637,452,000**	**3,603,324,412,837**

UTANG RETUR KPPN

KODE	KPPN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
001	BANDA ACEH	(273,215,056)	(669,183,161)	(942,398,217)
003	MEULABOH	-	(281,563,678)	(281,563,678)
004	MEDAN I	(152,245,334)	(60,701,583)	(212,946,917)
006	PADANG SIDEMPUAN	-	(30,837,050)	(30,837,050)
008	PEKANBARU	(24,587,649)	24,587,649	-
009	TANJUNG PINANG	-	(14,446,136)	(14,446,136)
010	PADANG	(23,498,323)	(38,510,621)	(62,008,944)
014	PALEMBANG	(245,826,202)	(5,854,538,382)	(6,100,364,584)
015	PANGKAL PINANG	(35,000,250)	(936,678,315)	(971,678,565)
016	BENGKULU	-	(351,500)	(351,500)
017	BANDAR LAMPUNG	(3,435,000)	(205,896,984)	(209,331,984)
018	JAKARTA I	-	(2,182,126,526)	(2,182,126,526)
019	JAKARTA II	(127,310,164)	(74,592,142,999)	(74,719,453,163)
020	SERANG	(281,342,887)	262,493,336	(18,849,551)
022	BANDUNG I	(16,610,197,864)	15,892,565,424	(717,632,440)
023	BOGOR	-	(817,347,140)	(817,347,140)
024	CIREBON	(252,954,937)	148,805,072	(104,149,865)
025	TASIKMALAYA	(382,743,016)	288,303,768	(94,439,248)
026	SEMARANG I	(183,855,552,548)	183,855,552,548	-
028	SURAKARTA	-	(106,380,000)	(106,380,000)
030	YOGYAKARTA	(75,594,757)	75,594,757	-
031	SURABAYA I	(42,592,542)	(288,264,144)	(330,856,686)
032	MALANG	-	(183,065,842)	(183,065,842)
034	KEDIRI	(151,599,448)	(1,932,696,047)	(2,084,295,495)
036	PAMEKASAN	(66,023,580)	66,023,580	-
037	DENPASAR	(547,522,294)	480,565,796	(66,956,498)
038	MATARAM	(45,800,000)	(118,197,000)	(163,997,000)
041	WAINGAPU	-	(457,581,307)	(457,581,307)
042	PONTIANAK	(2,168,297,365)	1,945,533,847	(222,763,518)
043	PALANGKARAYA	(277,256,288)	192,851,288	(84,405,000)
046	SAMARINDA	(42,000,000)	(104,777,969)	(146,777,969)
048	TARAKAN	(502,054,500)	502,054,500	-
049	MANADO	(2,074,809,670)	1,718,257,333	(356,552,337)
050	GORONTALO	(164,833,230)	122,335,587	(42,497,643)
051	PALU	(123,578,378)	123,578,378	-
052	POSO	(7,913,500)	7,913,500	-
054	MAKASSAR I	-	(381,077,461)	(381,077,461)
055	WATAMPONE	-	(2,000,000)	(2,000,000)
057	PARE PARE	-	(460,000)	(460,000)
059	MAJENE	(83,182,703)	57,101,622	(26,081,081)
060	KENDARI	(117,975,946)	(301,182,492)	(419,158,438)
061	AMBON	(123,125,000)	106,982,750	(16,142,250)
062	TERNATE	(391,849,126)	204,336,050	(187,513,076)
063	JAYAPURA	-	(127,745,475)	(127,745,475)
065	MANOKWARI	(6,000,000)	(93,383,545)	(99,383,545)
066	SORONG	(11,545,193)	(106,357,887)	(117,903,080)
068	MERAUKE	(3,930,440)	3,930,440	-

KODE	KPPN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
073	BOJONEGORO	(24,570,229)	24,570,229	-
074	TAPAKTUAN	-	(23,048,067)	(23,048,067)
075	RANTAU PRAPAT	-	(20,000,000)	(20,000,000)
082	TOLI TOLI	(13,401,541)	13,401,541	-
083	TAHUNA	(3,833,000)	(25,747,000)	(29,580,000)

KODE	KPPN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
086	KARAWANG	(3,734,102,182)	3,734,102,182	-
088	JAKARTA III	(2,821,505,364)	1,559,119,472	(1,262,385,892)
089	LHOKSEUMAWE	-	(24,817,280)	(24,817,280)
095	BANDUNG II	(56,000,000)	(55,137,877)	(111,137,877)
099	PACITAN	-	(1,161,000)	(1,161,000)
100	BANYUWANGI	(2,096,200)	2,096,200	-
102	PANGKALAN BUN	(24,442,365)	24,442,365	-
103	BAU BAU	-	(5,000,000)	(5,000,000)
109	BATURAJA	(67,667,341)	67,667,341	-
111	RUTENG	(62,117,170)	62,117,170	-
113	WAMENA	(5,814,000)	5,814,000	-
115	MAGELANG	(271,386,359)	271,386,359	-
116	KOTABUMI	-	(40,397,235)	(40,397,235)
121	MANNA	-	(2,850,000)	(2,850,000)
123	MEDAN II	(228,304,549)	228,304,549	-
126	METRO LAMPUNG	-	(10,029,500)	(10,029,500)
127	TANGERANG	(5,008,234)	(46,081,123)	(51,089,357)
129	KUDUS	(177,000,261)	177,000,261	-
133	JAKARTA IV	(1,961,055,256)	1,717,770,571	(243,284,685)
134	SEMARANG II	(80,737,941)	74,585,361	(6,152,580)
135	SURABAYA II	(344,731,087)	343,201,087	(1,530,000)
137	BATAM	(99,485,000)	65,354,750	(34,130,250)
139	JAKARTA V	(13,997,855,293)	6,822,790,608	(7,175,064,685)
140	KHUSUS PINJAMAN DAN HI	(133,442,963)	(8,689,491,037)	(8,822,934,000)
143	KUALA TUNGKAL	(53,687,982)	53,687,982	-
147	KUNINGAN	-	(2,940,915)	(2,940,915)
156	KOLAKA	(310,275,040)	296,773,441	(13,501,599)
160	SEKAYU	(88,157,500)	88,157,500	-
164	BANJARNEGARA	-	(76,548,000)	(76,548,000)
165	SIDOARJO	(100,372,530)	100,372,530	-
175	JAKARTA VI	(1,514,090,271)	429,683,509	(1,084,406,762)
178	MAMUJU	(190,510,000)	111,324,360	(79,185,640)
180	MARISA	(18,150,000)	18,150,000	-
182	JAKARTA VII	(14,448,671,709)	(2,057,804,888)	(16,506,476,597)
185	TANJUNG SELOR		262,425,446	
	TOTAL	**(250,396,290,003)**	**121,665,118,873**	**(128.731.171.130)***

*) Nilai termasuk Pengeluaran transito yang masih harus dibayar pada KPPN Ambon sebesar Rp7.750.000

Rincian utang pihak ketiga TDF

No.	kodesatker	Nama Daerah	Sisa Dana TDF (UPK-TDF)
1	990015	Provinsi Aceh	100,427,122,000
2	990078	Kab. Aceh Barat	157,184,183,000
3	990022	Kab. Aceh Besar	8,621,026,000
4	990061	Kab. Aceh Selatan	5,190,982,000
5	980007	Kab. Aceh Singkil	7,353,510,000
6	990082	Kab. Aceh Tengah	9,881,956,000
7	990099	Kab. Aceh Tenggara	5,993,426,000
8	990057	Kab. Aceh Timur	25,984,534,000
9	990040	Kab. Aceh Utara	18,083,918,000
10	980053	Kab. Bireuen	7,393,354,000
11	990036	Kab. Pidie	9,648,744,000
12	993372	Kab. Simeulue	5,965,086,000
13	990104	Kota Banda Aceh	13,122,461,000
14	990111	Kota Sabang	6,021,020,000
15	994672	Kota Langsa	6,014,836,000
16	994686	Kota Lhokseumawe	4,549,615,000
17	997430	Kab. Gayo Lues	6,203,167,000
18	997426	Kab. Aceh Barat Daya	10,321,539,000
19	997447	Kab. Aceh Jaya	9,122,189,000
20	997451	Kab. Nagan Raya	49,807,247,000
21	997468	Kab. Aceh Tamiang	13,916,461,000
22	987532	Kab. Bener Meriah	6,101,985,000
23	963311	Kab. Pidie Jaya	5,836,935,000
24	963327	Kota Subulussalam	4,992,608,000
25	990125	Provinsi Sumatera Utara	97,657,840,000
26	990221	Kab. Asahan	9,828,212,000
27	990192	Kab. Dairi	2,601,622,000
28	990132	Kab. Deli Serdang	15,531,849,000
29	990146	Kab. Karo	2,888,796,000
30	990188	Kab. Labuhanbatu	9,673,154,000
31	990150	Kab. Langkat	17,960,459,000
32	941915	Kab. Mandailing Natal	14,360,759,000
33	990235	Kab. Nias	1,970,019,000
34	990171	Kab. Simalungun	10,272,654,000
35	990214	Kab. Tapanuli Selatan	42,432,970,000
36	990167	Kab. Tapanuli Tengah	4,320,940,000
37	990200	Kab. Tapanuli Utara	10,014,381,000
38	941922	Kab. Toba	3,258,775,000
39	990260	Kota Binjai	3,068,827,000
40	990242	Kota Medan	66,809,579,000
41	990277	Kota Pematang Siantar	3,474,261,000
42	990298	Kota Sibolga	2,516,413,000
43	990281	Kota Tanjung Balai	2,451,470,000
44	990256	Kota Tebing Tinggi	2,604,640,000
45	994690	Kota Padang Sidempuan	4,116,515,000

No.	kodesatker	Nama Daerah	Sisa Dana TDF (UPK-TDF)
46	998147	Kab. Pakpak Bharat	1,986,516,000
47	998130	Kab. Nias Selatan	2,550,451,000
48	998151	Kab. Humbang Hasundutan	2,292,602,000
49	987418	Kab. Serdang Bedagai	7,957,914,000
50	987528	Kab. Samosir	2,184,955,000
51	963333	Kab. Batu Bara	5,397,834,000
52	975013	Kab. Padang Lawas	6,817,762,000
53	975163	Kab. Padang Lawas Utara	7,592,961,000
54	977267	Kab. Labuhanbatu Selatan	11,820,640,000
55	977117	Kab. Labuhanbatu Utara	7,117,430,000
56	978536	Kab. Nias Utara	1,994,477,000
57	978397	Kab. Nias Barat	2,092,239,000
58	978401	Kota Gunungsitoli	2,254,347,000
59	990303	Provinsi Sumatera Barat	38,208,353,000
60	990331	Kab. Limapuluh Kota	2,645,635,000
61	990310	Kab. Agam	2,408,832,000
62	980060	Kab. Kepulauan Mentawai	1,669,587,000
63	990352	Kab. Padang Pariaman	2,713,296,000
64	990324	Kab. Pasaman	1,984,686,000
65	990366	Kab. Pesisir Selatan	4,240,704,000
66	990387	Kab. Sijunjung	5,456,002,000
67	990345	Kab. Solok	6,116,721,000
68	990370	Kab. Tanah Datar	2,739,556,000
69	990391	Kota Bukit Tinggi	2,716,170,000
70	990409	Kota Padang Panjang	1,696,575,000
71	990434	Kota Padang	22,912,250,000
72	990441	Kota Payakumbuh	2,005,900,000
73	990420	Kota Sawahlunto	15,335,302,000
74	990413	Kota Solok	2,380,425,000
75	997611	Kota Pariaman	1,481,981,000
76	987595	Kab. Pasaman Barat	3,949,888,000
77	987574	Kab. Dharmasraya	7,386,327,000
78	987581	Kab. Solok Selatan	13,238,462,000
79	990455	Provinsi Riau	232,429,802,000
80	990476	Kab. Bengkalis	295,651,477,000
81	990502	Kab. Indragiri Hilir	81,599,827,000
82	990497	Kab. Indragiri Hulu	42,959,817,000
83	990462	Kab. Kampar	184,798,869,000
84	980138	Kab. Kuantan Singingi	43,181,588,000
85	980074	Kab. Pelalawan	83,677,067,000
86	980095	Kab. Rokan Hilir	225,817,378,000
87	980081	Kab. Rokan Hulu	56,088,085,000
88	980100	Kab. Siak	96,911,905,000
89	980142	Kota Dumai	45,459,012,000
90	990519	Kota Pekanbaru	57,012,943,000
91	978417	Kab. Kepulauan Meranti	30,862,408,000
92	990530	Provinsi Jambi	179,369,416,000

No.	kodesatker	Nama Daerah	Sisa Dana TDF (UPK-TDF)
93	990544	Kab. Batang Hari	40,452,072,000
94	990565	Kab. Bungo	25,229,337,000
95	990586	Kab. Kerinci	28,613,234,000
96	990572	Kab. Merangin	31,152,575,000
97	980184	Kab. Muaro Jambi	45,662,177,000
98	980163	Kab. Sarolangun	54,645,129,000
99	990551	Kab. Tanjung Jabung Barat	393,380,674,000
100	980522	Kab. Tanjung Jabung Timur	54,812,635,000
101	980170	Kab. Tebo	60,077,938,000
102	990590	Kota Jambi	34,722,323,000
103	977562	Kota Sungai Penuh	26,893,649,000
104	990608	Provinsi Sumatera Selatan	745,606,605,000
105	990661	Kab. Lahat	898,950,823,000
106	990633	Kab. Musi Banyuasin	274,790,429,000
107	990675	Kab. Musi Rawas	140,875,917,000
108	990654	Kab. Muara Enim	523,239,012,000
109	990682	Kab. Ogan Komering Ilir	83,317,919,000
110	990640	Kab. Ogan Komering Ulu	75,544,153,000
111	990696	Kota Palembang	100,013,524,000
112	994712	Kota Prabumulih	99,054,958,000
113	994729	Kota Pagar Alam	87,029,911,000
114	994733	Kota Lubuk Linggau	71,644,870,000
115	997557	Kab. Banyuasin	94,272,903,000
116	987560	Kab. Ogan Ilir	77,767,195,000
117	987549	Kab. OKU Timur	71,695,471,000
118	987553	Kab. OKU Selatan	75,969,930,000
119	963342	Kab. Empat Lawang	85,890,840,000
120	999011	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	167,152,651,000
121	999015	Kab. Musi Rawas Utara	214,507,049,000
122	990718	Provinsi Bengkulu	38,287,725,000
123	990739	Kab. Bengkulu Selatan	19,773,942,000
124	990722	Kab. Bengkulu Utara	59,938,988,000
125	990743	Kab. Rejang Lebong	7,936,321,000
126	990750	Kota Bengkulu	12,187,145,000
127	998215	Kab. Kaur	10,051,474,000
128	998201	Kab. Seluma	19,804,377,000
129	998503	Kab. Mukomuko	8,244,797,000
130	987600	Kab. Lebong	8,074,848,000
131	987617	Kab. Kepahiang	5,510,767,000
132	977710	Kab. Bengkulu Tengah	13,761,091,000
133	990764	Provinsi Lampung	41,299,193,000
134	990807	Kab. Lampung Barat	3,662,987,000
135	990771	Kab. Lampung Selatan	6,277,739,000
136	990785	Kab. Lampung Tengah	7,656,353,000
137	990792	Kab. Lampung Utara	3,004,483,000
138	980191	Kab. Lampung Timur	34,860,226,000
139	993351	Kab. Tanggamus	26,718,081,000

No.	kodesatker	Nama Daerah	Sisa Dana TDF (UPK-TDF)
140	993347	Kab. Tulang Bawang	4,540,482,000
141	980206	Kab. Way Kanan	5,085,623,000
142	990811	Kota Bandar Lampung	16,699,024,000
143	980210	Kota Metro	3,273,249,000
144	975311	Kab. Pesawaran	3,376,922,000
145	978423	Kab. Pringsewu	4,137,891,000
146	978432	Kab. Mesuji	3,925,151,000
147	978448	Kab. Tulang Bawang Barat	2,856,994,000
148	999003	Kab. Pesisir Barat	2,844,914,000
149	990828	Provinsi DKI Jakarta	5,635,471,860,000
150	990881	Provinsi Jawa Barat	671,602,532,000
151	991003	Kab. Bandung	185,499,896,000
152	990963	Kab. Bekasi	152,337,974,000
153	990938	Kab. Bogor	100,644,242,000
154	991045	Kab. Ciamis	19,450,516,000
155	990959	Kab. Cianjur	27,237,477,000
156	991052	Kab. Cirebon	21,797,469,000
157	991024	Kab. Garut	97,974,461,000
158	991070	Kab. Indramayu	37,072,970,000
159	990970	Kab. Karawang	109,583,421,000
160	991066	Kab. Kuningan	18,863,475,000
161	991087	Kab. Majalengka	19,198,633,000
162	990984	Kab. Purwakarta	28,690,403,000
163	990991	Kab. Subang	60,966,095,000
164	990942	Kab. Sukabumi	98,357,825,000
165	991010	Kab. Sumedang	29,576,034,000
166	991031	Kab. Tasikmalaya	22,123,421,000
167	991091	Kota Bandung	143,214,224,000
168	993330	Kota Bekasi	52,642,889,000
169	991109	Kota Bogor	23,768,880,000
170	991120	Kota Cirebon	21,641,361,000
171	980032	Kota Depok	37,796,654,000
172	991113	Kota Sukabumi	21,738,465,000
173	994740	Kota Tasikmalaya	19,994,457,000
174	994754	Kota Cimahi	26,634,160,000
175	998126	Kota Banjar	18,170,357,000
176	963302	Kab. Bandung Barat	29,629,466,000
177	999002	Kab. Pangandaran	17,179,218,000
178	991141	Provinsi Jawa Tengah	98,445,714,000
179	991329	Kab. Banjarnegara	4,008,288,000
180	991290	Kab. Banyumas	6,081,488,000
181	991202	Kab. Batang	5,150,968,000
182	991286	Kab. Blora	23,532,060,000
183	991396	Kab. Boyolali	3,507,623,000
184	991223	Kab. Brebes	4,441,583,000
185	991308	Kab. Cilacap	7,404,558,000
186	991176	Kab. Demak	3,351,549,000

No.	kodesatker	Nama Daerah	Sisa Dana TDF (UPK-TDF)
187	991180	Kab. Grobogan	4,627,865,000
188	991265	Kab. Jepara	7,803,178,000
189	991422	Kab. Karanganyar	6,228,748,000
190	991375	Kab. Kebumen	3,261,159,000
191	991162	Kab. Kendal	4,125,919,000
192	991382	Kab. Klaten	3,460,083,000
193	991244	Kab. Kudus	12,526,823,000
194	991333	Kab. Magelang	2,816,517,000
195	991230	Kab. Pati	4,948,882,000
196	991197	Kab. Pekalongan	2,381,943,000
197	991251	Kab. Pemalang	2,710,515,000
198	991312	Kab. Purbalingga	3,224,940,000
199	991361	Kab. Purworejo	2,606,748,000
200	991272	Kab. Rembang	3,088,591,000
201	991155	Kab. Semarang	4,819,384,000
202	991401	Kab. Sragen	3,183,206,000
203	991418	Kab. Sukoharjo	4,802,302,000
204	991219	Kab. Tegal	4,235,942,000
205	991340	Kab. Temanggung	2,829,255,000
206	991439	Kab. Wonogiri	2,795,013,000
207	991354	Kab. Wonosobo	2,958,287,000
208	991485	Kota Magelang	3,105,452,000
209	991464	Kota Pekalongan	2,986,420,000
210	991450	Kota Salatiga	2,930,211,000
211	991443	Kota Semarang	39,301,095,000
212	991492	Kota Surakarta	7,693,293,000
213	991471	Kota Tegal	3,186,738,000
214	991507	Provinsi DI Yogyakarta	26,968,273,000
215	991511	Kab. Bantul	7,522,046,000
216	991532	Kab. Gunung Kidul	2,772,353,000
217	991549	Kab. Kulon Progo	3,147,269,000
218	991528	Kab. Sleman	15,423,618,000
219	991553	Kota Yogyakarta	8,848,148,000
220	991560	Provinsi Jawa Timur	686,528,831,000
221	991642	Kab. Bangkalan	19,506,188,000
222	991670	Kab. Banyuwangi	31,804,066,000
223	991773	Kab. Blitar	17,704,394,000
224	991837	Kab. Bojonegoro	1,434,245,889,000
225	991659	Kab. Bondowoso	19,217,447,000
226	991574	Kab. Gresik	48,481,956,000
227	991684	Kab. Jember	15,015,262,000
228	991600	Kab. Jombang	32,587,671,000
229	991731	Kab. Kediri	14,595,345,000
230	991858	Kab. Lamongan	27,618,036,000
231	991727	Kab. Lumajang	15,823,096,000
232	991780	Kab. Madiun	29,621,876,000
233	991802	Kab. Magetan	16,828,723,000

No.	kodesatker	Nama Daerah	Sisa Dana TDF (UPK-TDF)
234	991691	Kab. Malang	20,546,103,000
235	991581	Kab. Mojokerto	23,942,900,000
236	991752	Kab. Nganjuk	30,770,939,000
237	991794	Kab. Ngawi	34,893,726,000
238	991820	Kab. Pacitan	19,110,147,000
239	991621	Kab. Pamekasan	17,593,197,000
240	991706	Kab. Pasuruan	25,049,135,000
241	991816	Kab. Ponorogo	17,278,119,000
242	991710	Kab. Probolinggo	18,427,229,000
243	991617	Kab. Sampang	15,335,955,000
244	991595	Kab. Sidoarjo	31,167,768,000
245	991663	Kab. Situbondo	18,698,940,000
246	991638	Kab. Sumenep	9,794,269,000
247	991769	Kab. Trenggalek	19,623,547,000
248	991841	Kab. Tuban	51,614,742,000
249	991748	Kab. Tulungagung	20,826,700,000
250	991912	Kota Blitar	16,172,960,000
251	991926	Kota Kediri	13,070,645,000
252	991930	Kota Madiun	18,468,416,000
253	991883	Kota Malang	27,196,465,000
254	991879	Kota Mojokerto	16,641,725,000
255	991890	Kota Pasuruan	15,513,165,000
256	991905	Kota Probolinggo	17,513,811,000
257	991862	Kota Surabaya	142,650,616,000
258	994761	Kota Batu	16,977,004,000
259	991947	Provinsi Kalimantan Barat	125,611,193,000
260	980227	Kab. Bengkayang	18,930,439,000
261	980231	Kab. Landak	12,558,845,000
262	991993	Kab. Kapuas Hulu	23,275,841,000
263	992008	Kab. Ketapang	114,797,233,000
264	991989	Kab. Mempawah	12,168,431,000
265	991951	Kab. Sambas	13,548,676,000
266	991968	Kab. Sanggau	115,867,299,000
267	991972	Kab. Sintang	38,185,644,000
268	992012	Kota Pontianak	29,385,787,000
269	994775	Kota Singkawang	11,026,729,000
270	987507	Kab. Sekadau	23,553,068,000
271	987492	Kab. Melawi	11,572,174,000
272	963358	Kab. Kayong Utara	9,369,691,000
273	975616	Kab. Kubu Raya	23,189,718,000
274	992029	Provinsi Kalimantan Tengah	1,311,837,155,000
275	992054	Kab. Barito Selatan	374,213,607,000
276	992040	Kab. Barito Utara	1,236,844,680,000
277	992033	Kab. Kapuas	765,390,836,000
278	992075	Kab. Kotawaringin Barat	181,482,566,000
279	992061	Kab. Kotawaringin Timur	248,953,806,000
280	992082	Kota Palangkaraya	180,978,402,000

No.	kodesatker	Nama Daerah	Sisa Dana TDF (UPK-TDF)
281	997472	Kab. Katingan	154,559,111,000
282	997489	Kab. Seruyan	182,898,235,000
283	997493	Kab. Sukamara	171,774,214,000
284	997501	Kab. Lamandau	162,443,272,000
285	997515	Kab. Gunung Mas	236,938,772,000
286	997522	Kab. Pulang Pisau	188,045,589,000
287	997536	Kab. Murung Raya	906,878,830,000
288	997540	Kab. Barito Timur	171,219,675,000
289	992164	Provinsi Kalimantan Selatan	1,494,475,990,000
290	992171	Kab. Banjar	318,839,919,000
291	992228	Kab. Barito Kuala	238,910,635,000
292	992207	Kab. Hulu Sungai Selatan	135,163,572,000
293	992211	Kab. Hulu Sungai Tengah	218,909,242,000
294	992253	Kab. Hulu Sungai Utara	231,704,614,000
295	992249	Kab. Kotabaru	758,147,091,000
296	992232	Kab. Tabalong	368,764,124,000
297	992185	Kab. Tanah Laut	226,152,411,000
298	992192	Kab. Tapin	470,246,732,000
299	980248	Kota Banjarbaru	192,812,046,000
300	992260	Kota Banjarmasin	188,003,256,000
301	998236	Kab. Balangan	1,098,657,770,000
302	998222	Kab. Tanah Bumbu	1,416,066,017,000
303	992096	Provinsi Kalimantan Timur	3,784,618,371,000
304	992139	Kab. Berau	1,454,993,893,000
305	992101	Kab. Kutai Kartanegara	3,924,545,964,000
306	980273	Kab. Kutai Barat	1,438,121,168,000
307	980280	Kab. Kutai Timur	2,974,580,853,000
308	992118	Kab. Paser	884,064,944,000
309	992150	Kota Balikpapan	740,708,725,000
310	980294	Kota Bontang	785,900,090,000
311	992143	Kota Samarinda	713,036,591,000
312	997561	Kab. Penajam Paser Utara	685,453,131,000
313	999006	Kab. Mahakam Ulu	914,399,986,000
314	993021	Provinsi Sulawesi Utara	30,792,335,000
315	993059	Kab. Bolaang Mongondow	10,900,154,000
316	993042	Kab. Minahasa	17,583,570,000
317	993063	Kab. Kepulauan Sangihe	2,407,516,000
318	993091	Kota Bitung	11,944,823,000
319	993070	Kota Manado	9,123,176,000
320	997412	Kab. Kepulauan Talaud	2,125,689,000
321	998240	Kab. Minahasa Selatan	4,047,059,000
322	998257	Kota Tomohon	14,835,988,000
323	987485	Kab. Minahasa Utara	14,724,073,000
324	963389	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	1,975,313,000
325	963395	Kota Kotamobagu	3,003,290,000
326	963409	Kab. Bolaang Mongondow Utara	2,893,739,000
327	963415	Kab. Minahasa Tenggara	2,646,664,000

No.	kodesatker	Nama Daerah	Sisa Dana TDF (UPK-TDF)
328	975022	Kab. Bolaang Mongondow Timur	2,913,004,000
329	977860	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	5,935,291,000
330	992960	Provinsi Sulawesi Tengah	530,526,265,000
331	993000	Kab. Banggai	687,606,436,000
332	980337	Kab. Banggai Kepulauan	73,257,263,000
333	980316	Kab. Buol	68,628,896,000
334	992998	Kab. Toli-Toli	66,575,557,000
335	992981	Kab. Donggala	73,568,797,000
336	980320	Kab. Morowali	480,132,281,000
337	992977	Kab. Poso	77,257,266,000
338	993017	Kota Palu	81,654,183,000
339	997582	Kab. Parigi Moutong	66,419,388,000
340	987471	Kab. Tojo Una-Una	71,752,025,000
341	975172	Kab. Sigi	66,547,534,000
342	999009	Kab. Banggai Laut	72,661,657,000
343	999013	Kab. Morowali Utara	196,206,290,000
344	992722	Provinsi Sulawesi Selatan	72,150,509,000
345	992846	Kab. Bantaeng	2,043,095,000
346	992888	Kab. Barru	2,255,680,000
347	992778	Kab. Bone	3,338,711,000
348	992832	Kab. Bulukumba	2,476,624,000
349	992935	Kab. Enrekang	1,872,186,000
350	992740	Kab. Gowa	3,196,529,000
351	992850	Kab. Jeneponto	1,970,128,000
352	992811	Kab. Luwu	2,152,729,000
353	980341	Kab. Luwu Utara	4,989,130,000
354	992799	Kab. Maros	3,025,041,000
355	992900	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	3,599,223,000
356	997604	Kota Palopo	3,003,694,000
357	928282	Kab. Luwu Timur	82,562,997,000
358	992736	Kab. Pinrang	2,016,974,000
359	992825	Kab. Sinjai	2,032,344,000
360	992867	Kab. Kepulauan Selayar	1,833,771,000
361	992892	Kab. Sidenreng Rappang	2,070,146,000
362	992914	Kab. Soppeng	2,572,772,000
363	992871	Kab. Takalar	2,671,544,000
364	992782	Kab. Tana Toraja	2,296,160,000
365	992757	Kab. Wajo	4,955,718,000
366	992956	Kota Pare-pare	2,380,859,000
367	992942	Kota Makassar	39,141,387,000
368	975327	Kab. Toraja Utara	1,897,800,000
369	993106	Provinsi Sulawesi Tenggara	513,003,296,000
370	993127	Kab. Buton	42,940,277,000
371	993110	Kab. Konawe	108,135,304,000
372	993148	Kab. Kolaka	147,816,687,000
373	993131	Kab. Muna	43,313,252,000
374	993326	Kota Kendari	55,628,415,000

No.	kodesatker	Nama Daerah	Sisa Dana TDF (UPK-TDF)
375	994782	Kota Bau-bau	42,911,163,000
376	998304	Kab. Konawe Selatan	166,125,511,000
377	987642	Kab. Bombana	131,276,444,000
378	987638	Kab. Wakatobi	41,771,559,000
379	987443	Kab. Kolaka Utara	142,690,700,000
380	963364	Kab. Konawe Utara	668,415,585,000
381	963370	Kab. Buton Utara	41,477,994,000
382	999014	Kab. Konawe Kepulauan	43,965,569,000
383	999012	Kab. Kolaka Timur	61,702,285,000
384	999915	Kab. Muna Barat	42,122,573,000
385	999016	Kab. Buton Tengah	64,163,316,000
386	999017	Kab. Buton Selatan	41,282,060,000
387	992274	Provinsi Bali	27,241,942,000
388	992342	Kab. Badung	12,228,604,000
389	992338	Kab. Bangli	1,977,742,000
390	992281	Kab. Buleleng	3,562,991,000
391	992317	Kab. Gianyar	3,364,411,000
392	992295	Kab. Jembrana	2,865,681,000
393	992321	Kab. Karangasem	2,299,473,000
394	992300	Kab. Klungkung	2,141,433,000
395	992359	Kab. Tabanan	2,954,112,000
396	992363	Kota Denpasar	21,811,764,000
397	992370	Provinsi Nusa Tenggara Barat	194,778,544,000
398	992410	Kab. Bima	31,935,352,000
399	992431	Kab. Dompu	29,039,899,000
400	992384	Kab. Lombok Barat	33,876,513,000
401	992391	Kab. Lombok Tengah	32,426,834,000
402	992406	Kab. Lombok Timur	29,561,733,000
403	992427	Kab. Sumbawa	84,401,405,000
404	992448	Kota Mataram	34,599,246,000
405	997625	Kota Bima	29,342,498,000
406	987450	Kab. Sumbawa Barat	400,521,762,000
407	975477	Kab. Lombok Utara	29,757,188,000
408	992452	Provinsi Nusa Tenggara Timur	9,512,822,000
409	992502	Kab. Alor	542,437,000
410	992473	Kab. Belu	609,063,000
411	992537	Kab. Ende	1,490,487,000
412	992520	Kab. Flores Timur	673,770,000
413	992469	Kab. Kupang	765,588,000
414	980379	Kab. Lembata	508,121,000
415	992558	Kab. Manggarai	1,430,759,000
416	992541	Kab. Ngada	486,399,000
417	992516	Kab. Sikka	946,981,000
418	992579	Kab. Sumba Barat	478,626,000
419	992562	Kab. Sumba Timur	1,080,850,000
420	992494	Kab. Timor Tengah Selatan	545,725,000
421	992480	Kab. Timor Tengah Utara	614,997,000

No.	kodesatker	Nama Daerah	Sisa Dana TDF (UPK-TDF)
422	993368	Kota Kupang	3,910,929,000
423	997578	Kab. Rote Ndao	422,694,000
424	998510	Kab. Manggarai Barat	780,050,000
425	963430	Kab. Nagekeo	493,473,000
426	963446	Kab. Sumba Barat Daya	493,575,000
427	963452	Kab. Sumba Tengah	346,761,000
428	975911	Kab. Manggarai Timur	549,954,000
429	978542	Kab. Sabu Raijua	334,407,000
430	999007	Kab. Malaka	412,908,000
431	993152	Provinsi Maluku	6,909,714,000
432	980358	Kab. Kepulauan Tanimbar	1,023,235,000
433	993169	Kab. Maluku Tengah	2,126,672,000
434	993173	Kab. Maluku Tenggara	669,441,000
435	980362	Kab. Buru	904,213,000
436	993202	Kota Ambon	3,612,833,000
437	987439	Kab. Seram Bagian Barat	772,211,000
438	987422	Kab. Seram Bagian Timur	4,052,843,000
439	987621	Kab. Kepulauan Aru	898,509,000
440	976061	Kota Tual	621,604,000
441	975772	Kab. Maluku Barat Daya	5,333,937,000
442	975622	Kab. Buru Selatan	793,508,000
443	980011	Provinsi Maluku Utara	428,827,822,000
444	993194	Kab. Halmahera Tengah	553,040,541,000
445	980028	Kota Ternate	67,704,456,000
446	993180	Kab. Halmahera Barat	68,542,903,000
447	998346	Kab. Halmahera Timur	499,150,806,000
448	998325	Kab. Halmahera Selatan	180,705,816,000
449	998311	Kab. Halmahera Utara	13,391,279,000
450	998332	Kab. Kepulauan Sula	38,360,713,000
451	998350	Kota Tidore Kepulauan	104,161,552,000
452	978551	Kab. Pulau Morotai	67,739,607,000
453	999010	Kab. Pulau Taliabu	64,441,489,000
454	993809	Provinsi Banten	296,257,105,000
455	990917	Kab. Lebak	27,028,040,000
456	990900	Kab. Pandeglang	24,821,743,000
457	990895	Kab. Serang	46,052,897,000
458	990921	Kab. Tangerang	138,142,111,000
459	980049	Kota Cilegon	37,267,923,000
460	991134	Kota Tangerang	82,759,957,000
461	975461	Kota Serang	27,886,338,000
462	978454	Kota Tangerang Selatan	85,939,745,000
463	993813	Provinsi Bangka Belitung	75,929,654,000
464	990629	Kab. Bangka	42,526,718,000
465	990612	Kab. Belitung	27,556,178,000
466	990701	Kota Pangkal Pinang	21,720,859,000
467	998189	Kab. Bangka Selatan	41,411,262,000
468	998172	Kab. Bangka Tengah	27,179,807,000

No.	kodesatker	Nama Daerah	Sisa Dana TDF (UPK-TDF)
469	998168	Kab. Bangka Barat	33,010,315,000
470	998193	Kab. Belitung Timur	30,081,842,000
471	993820	Provinsi Gorontalo	4,173,559,000
472	980302	Kab. Boalemo	3,572,936,000
473	993038	Kab. Gorontalo	2,040,012,000
474	993084	Kota Gorontalo	1,989,962,000
475	998261	Kab. Pohuwato	1,437,908,000
476	998278	Kab. Bone Bolango	1,769,598,000
477	963421	Kab. Gorontalo Utara	754,206,000
478	998840	Provinsi Kepulauan Riau	30,016,970,000
479	980121	Kab. Natuna	15,132,536,000
480	977412	Kab. Kepulauan Anambas	21,553,208,050
481	980117	Kab. Karimun	74,866,387,000
482	990523	Kota Batam	119,557,676,000
483	994708	Kota Tanjung Pinang	68,023,923,000
484	987464	Kab. Lingga	64,227,339,000
485	990480	Kab. Bintan	67,738,603,000
486	955383	Provinsi Sulawesi Barat	2,891,771,000
487	992804	Kab. Majene	631,945,000
488	992761	Kab. Mamuju	2,080,402,000
489	992921	Kab. Polewali Mandar	930,718,000
490	997599	Kab. Mamasa	438,906,000
491	998299	Kab. Pasangkayu	1,715,951,000
492	999008	Kab. Mamuju Tengah	598,693,000
493	999001	Provinsi Kalimantan Utara	380,344,482,000
494	992122	Kab. Bulungan	332,597,443,000
495	980269	Kab. Malinau	551,073,603,000
496	980252	Kab. Nunukan	381,987,057,000
497	941901	Kota Tarakan	167,292,974,000
498	975766	Kab. Tana Tidung	414,721,110,000
499	998854	Provinsi Papua Barat	227,451,503,000
500	993241	Kab. Manokwari	24,207,634,000
501	993279	Kab. Fak Fak	35,155,534,000
502	998481	Kab. Teluk Bintuni	555,129,764,000
503	998498	Kab. Teluk Wondama	11,580,514,000
504	998435	Kab. Kaimana	38,923,100,000
505	999005	Kab. Pegunungan Arfak	22,005,055,000
506	999004	Kab. Manokwari Selatan	26,442,176,000
507	999018	Provinsi Papua Selatan	90,150,969,000
508	993283	Kab. Merauke	15,390,637,000
509	998388	Kab. Boven Digoel	12,485,550,000
510	998367	Kab. Mappi	11,500,537,000
511	998371	Kab. Asmat	32,823,546,000
512	999019	Provinsi Papua Tengah	54,990,366,000
513	993401	Kab. Mimika	595,265,168,000
514	993305	Kab. Nabire	12,128,333,000
515	993393	Kab. Paniai	33,134,935,000

No.	kodesatker	Nama Daerah	Sisa Dana TDF (UPK-TDF)
516	993389	Kab. Puncak Jaya	11,231,097,450
517	976812	Kab. Puncak	33,271,528,000
518	976962	Kab. Dogiyai	32,983,906,000
519	978567	Kab. Intan Jaya	32,856,381,000
520	978573	Kab. Deiyai	33,341,183,000
521	999020	Provinsi Papua Pegunungan	50,703,692,000
522	993290	Kab. Jayawijaya	11,387,996,000
523	998477	Kab. Yahukimo	11,464,504,000
524	998414	Kab. Tolikara	11,389,829,000
525	976219	Kab. Mamberamo Tengah	11,173,833,000
526	976369	Kab. Yalimo	11,212,851,000
527	998421	Kab. Pegunungan Bintang	12,228,483,000
528	976514	Kab. Lanny Jaya	11,171,506,000
529	976664	Kab. Nduga	33,449,120,000
530	999021	Provinsi Papua Barat Daya	14,047,519,000
531	993262	Kab. Sorong	33,135,898,000
532	998442	Kab. Sorong Selatan	22,393,708,000
533	998456	Kab. Raja Ampat	77,118,704,000
534	978598	Kab. Tambrauw	22,287,320,000
535	978582	Kab. Maybrat	22,916,638,000
536	980383	Kota Sorong	30,300,028,000
537	993216	Provinsi Papua	67,496,568,000
538	993220	Kab. Jayapura	12,070,210,000
539	993237	Kab. Biak Numfor	11,502,309,000
540	993258	Kab. Kepulauan Yapen	11,281,907,000
541	998392	Kab. Sarmi	13,114,838,000
542	998400	Kab. Keerom	12,620,275,000
543	963461	Kab. Mamberamo Raya	11,354,797,000
544	998460	Kab. Waropen	11,322,374,000
545	987511	Kab. Supiori	11,146,457,000
546	993312	Kota Jayapura	31,247,865,000
			66,498,332,128,500

Rincian Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2023

Organisasi Internasional	Mata Uang	Sisa Utang Jangka Pendek lain-lain 31 Desember 2022		Transaksi TA 2023				Selisih Konfirmasi Pembayaran		Penghapusan Utang Semester I (Koreksi Lain-lain)		Jurnal Koreksi nilai Utang Triwulan III		Utang Jangka Pendek lain-lain 31 Des 2023	
				Penambahan Utang Kontribusi (Sesuai SPM)		Pengurangan Utang									
		Valas	IDR	Valas	IDR	Valas	IDR	Valas	IDR	Valas	IDR	Valas	IDR	Valas	IDR
IFSD	USD	118,070.50	1,840,955,236	-	-	118,099.50	1,807,867,146	-	-	-	-	29.00	7,465,838	-	-
OFID	USD	67.50	1,052,460	380,000.00	15,216	380,000.00	5,804,120,009	-	-	67.50	1,045,373			-	-
AMRO	USD	51.30	799,870	-	-	-	-	-	-	-	-			51.30	792,021
OECD BEPS Project	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
GFTEI	EUR	0.31	5,149	-	-	-	-	-	-	-	-			0.31	5,297
AMTF	USD	65.00	1,013,480	15,000.00	15,194	15,000.00	227,640,000	27.50	417,835	-	-	(37.50)	-	55.00	849,145
USAID Trust Fund	IDR	-	-	5,000,000,000.00	1	5,000,000,000.00	5,000,000,000	-	-	-	-			-	-
GGGI	USD	32.50	506,740	-	-	-	-	-	-	32.50	503,328			-	-
Fasilitas KSS	USD	19.50	304,044	-	-	-	-	-	-	-	-	(19.50)	-	19.50	301,061
GCF	USD	5,600.00	87,315,200	-	-	5,850.50	85,426,294	-	-	-	-			-	-
APTERR	USD	50.84	792,697	-	-	-	-	-	-	50.84	787,359			-	-
AAHTF	USD	17.50	272,860	-	-	-	-	-	-	-	-			17.50	270,181
APTCF	USD	295.00	4,599,640	-	-	-	-	-	-	-	-			295.00	4,554,505
GIH	USD	20.00	311,840	-	-	-	-	-	-	-	-			20.00	308,780
ASEAN ICT Fund	USD	60.00	935,520	-	-	-	-	-	-	-	-			60.00	926,340
TCF IAEA	EUR	0.50	830	-	-	-	-	-	-	0.50	8,204			-	-
ATHPC Fund	USD	10.00	155,920	-	-	-	-	-	-	-	-			10.00	154,390
ADF	USD	-	-	3,943,600.00	15,154	3,943,600.00	58,877,948,000	-	-	-	-			-	-
SOMTC Polri	USD	-	-	250,000.00	15,294	250,000.00	3,823,500,000	10.00	152,940	-	-			10.00	154,390
Pandemic Fund FIF	USD	-	-	9,845,000.00	15,239	9,845,000.00	150,027,955,000	-	-	-	-	155,000.00	2,362,045,000	155,000.00	2,393,045,000
		124,360.45	**1,939,021,486**	**5,014,433,600.00**	**76,098**	**5,014,557,550.00**	**225,654,456,449**	**37.50**	**570,775**	**151.34**	**2,344,264**	**154,972.00**	**2,369,510,838**	**155,538.61**	**2,401,361,110**

Rincian Utang Subsidi berdasarkan tagihan-tagihan IJP KUR dan subsidi bunga/subsidi marjin KUR yang sudah dilakukan verifikasi dan telah terbit Berita Acara Verifikasi

No.	Nama Penjamin / Penyalur	Subsidi KUR Reguler	Tunggakan Subsidi Tambahan Tahun 2021
1	PT. Askrindo	16,135,205,138	-
2	BRI	1,242,501,010,342	
3	Bank Mandiri	348,736,251,035	-
4	BNI	147,629,677,733	-
5	Bank KB Bukopin	310,665,822	-
6	OCBC-NISP	3,025,532	-
7	BTPN	82,006,214	-
8	BPD Bali	15,150,414,129	-
9	BPD DI Yogyakarta	8,387,028,173	-
10	BPD Sulselbar	1,593,813,273	-
11	BPD Jateng	41,355,453,854	-
12	BPD Sumut	11,383,419,606	-
13	Bank Riau Kepri Syariah	9,866,506,047	-
14	Bank Nagari	15,135,173,437	-
15	Bank Sinarmas	5,691,266,583	-
16	BCA	3,751,530,281	-
17	BPD Kalbar	4,443,560,342	-
18	Bank Permata	8,533,916	-
19	Bank Jabar Banten (BJB)	16,741,384,758	-
20	BPD Papua	1,170,536,148	-
21	BPD Jambi	2,536,831,877	-
22	Bank Raya Indonesia	159,611,106	-
23	BPD Lampung	5,671,892,987	-
24	Bank Syariah Indonesia	119,310,587,949	-
25	BPD Bengkulu	508,905,267	-
26	Kospin Jasa	1,399,727,280	-
27	BPD Sumselbabel	17,984,182,404	-
28	BPD Kalteng	556,639,628	-
29	Kopdit Obor Mas	533,879,860	-
30	BPD Kaltimtara	832,671,744	-
31	BPD Sulawesi Tenggara	740,569,347	-
32	KSP Guna Prima Dana	374,522,291	-
33	Bank Nationalnobu	3,890,045,751	-
34	Bank Mandiri Taspen	1,233,653,574	-
35	BPD SulutGo	1,723,487,398	-
36	Bank Jatim	21,449,616,804	-

No.	Nama Penjamin / Penyalur	Subsidi KUR Reguler	Tunggakan Subsidi Tambahan Tahun 2021
37	Bank DKI	9,764,349,874	-
38	PT Pegadaian	29,787,282,646	-
39	Bank INA Perdana	291,172,457	-
40	Bank Aceh Syariah	3,745,346,744	-
41	BPR Indra Candra	306,957,654	-
42	BPR Agung Sejahtera	3,643,776	-
Grand Total		**2,112,882,040,781**	**0**

UTANG TRANSFER KE DAERAH
TAHUN 2023

No.	Nama Daerah	Utang Transfer ke Daerah		Total Utang Transfer ke Daerah
		DBH	DAK Nonfisik	
1	Provinsi Aceh	9,796	665,933,191	665,942,987
2	Kab. Aceh Barat	9,200	21,595,200	21,604,400
3	Kab. Aceh Barat Daya	6,869	0	6,869
4	Kab. Aceh Besar	5,114	417,750,000	417,755,114
5	Kab. Aceh Jaya	5,588	50,249,500	50,255,088
6	Kab. Aceh Selatan	4,742	0	4,742
7	Kab. Aceh Singkil	3,686	160,267,980	160,271,666
8	Kab. Aceh Tamiang	2,617	0	2,617
9	Kab. Aceh Tengah	4,827	0	4,827
10	Kab. Aceh Tenggara	2,493	0	2,493
11	Kab. Aceh Timur	5,350	0	5,350
12	Kab. Aceh Utara	4,798	0	4,798
13	Kab. Bener Meriah	3,388	315,250,000	315,253,388
14	Kab. Bireuen	4,573	23,750,050	23,754,623
15	Kab. Gayo Lues	3,542	3,209,900	3,213,442
16	Kab. Nagan Raya	6,494	909,845,000	909,851,494
17	Kab. Pidie	5,944	17,340,000	17,345,944
18	Kab. Pidie Jaya	2,379	108,345,000	108,347,379
19	Kab. Simeulue	2,699	0	2,699
20	Kota Banda Aceh	2,761	0	2,761
21	Kota Langsa	3,041	40,470,647	40,473,688
22	Kota Lhokseumawe	2,107	0	2,107
23	Kota Sabang	1,167	0	1,167
24	Kota Subulussalam	2,555	48,750,000	48,752,555
25	Provinsi Sumatera Utara	5,294	1,194,048,505	1,194,053,799
26	Kab. Asahan	3,354	0	3,354
27	Kab. Batu Bara	3,175	89,250,500	89,253,675
28	Kab. Dairi	2,665	0	2,665
29	Kab. Deli Serdang	2,935	1,554,375,000	1,554,377,935
30	Kab. Humbang Hasundutan	3,556	165,999,250	166,002,806
31	Kab. Karo	5,188	0	5,188
32	Kab. Labuhanbatu	8,408	0	8,408
33	Kab. Labuhanbatu Selatan	6,110	0	6,110
34	Kab. Labuhanbatu Utara	3,048	0	3,048
35	Kab. Langkat	5,370	15,844,445	15,849,815
36	Kab. Mandailing Natal	5,452	632,000,000	632,005,452
37	Kab. Nias	2,846	6,416,313,994	6,416,316,840
38	Kab. Nias Barat	2,537	2,683,821,964	2,683,824,501
39	Kab. Nias Selatan	4,493	0	4,493
40	Kab. Nias Utara	3,736	282,071,117	282,074,853
41	Kab. Padang Lawas	5,970	0	5,970
42	Kab. Padang Lawas Utara	5,573	0	5,573
43	Kab. Pakpak Bharat	4,167	9,250,000	9,254,167
44	Kab. Samosir	2,929	27,000,000	27,002,929
45	Kab. Serdang Bedagai	4,226	0	4,226

No.	Nama Daerah	Utang Transfer ke Daerah		Total Utang Transfer ke Daerah
		DBH	DAK Nonfisik	
46	Kab. Simalungun	4,828	106,125,001	106,129,829
47	Kab. Tapanuli Selatan	4,438	585,000,000	585,004,438
48	Kab. Tapanuli Tengah	4,117	124,244,492	124,248,609
49	Kab. Tapanuli Utara	3,476	0	3,476
50	Kab. Toba Samosir	3,010	413,750,000	413,753,010
51	Kota Binjai	2,314	250,227,962	250,230,276
52	Kota Gunungsitoli	2,237	473,258,713	473,260,950
53	Kota Medan	7,400	693,148,866	693,156,266
54	Kota Padang Sidempuan	3,454	67,277,365	67,280,819
55	Kota Pematang Siantar	3,322	383,075,000	383,078,322
56	Kota Sibolga	2,577	93,991,950	93,994,527
57	Kota Tanjung Balai	2,957	96,000,000	96,002,957
58	Kota Tebing Tinggi	2,470	124,000,000	124,002,470
59	Provinsi Sumatera Barat	4,574	0	4,574
60	Kab. Agam	3,316	0	3,316
61	Kab. Dharmasraya	4,658	599,574,050	599,578,708
62	Kab. Kepulauan Mentawai	2,462	55,250,000	55,252,462
63	Kab. Lima Puluh Kota	3,073	89,750,000	89,753,073
64	Kab. Padang Pariaman	2,342	0	2,342
65	Kab. Pasaman	3,263	0	3,263
66	Kab. Pasaman Barat	3,023	130,500,000	130,503,023
67	Kab. Pesisir Selatan	2,929	0	2,929
68	Kab. Sijunjung	7,348	205,095,378	205,102,726
69	Kab. Solok	8,354	23,836,100	23,844,454
70	Kab. Solok Selatan	4,076	60,000,000	60,004,076
71	Kab. Tanah Datar	3,834	0	3,834
72	Kota Bukit Tinggi	3,237	56,500,000	56,503,237
73	Kota Padang	6,236	0	6,236
74	Kota Padang Panjang	2,460	3,250,000	3,252,460
75	Kota Pariaman	1,781	101,044,610	101,046,391
76	Kota Payakumbuh	2,055	0	2,055
77	Kota Sawahlunto	5,732	0	5,732
78	Kota Solok	1,991	0	1,991
79	Provinsi Riau	5,466	3,046,750,000	3,046,755,466
80	Kab. Bengkalis	4,346	0	4,346
81	Kab. Indragiri Hilir	5,122	0	5,122
82	Kab. Indragiri Hulu	4,613	182,500,575	182,505,188
83	Kab. Kampar	5,014	659,038,100	659,043,114
84	Kab. Kepulauan Meranti	4,940	0	4,940
85	Kab. Kuantan Singingi	6,504	655,811,817	655,818,321
86	Kab. Pelalawan	7,689	0	7,689
87	Kab. Rokan Hilir	8,657	0	8,657
88	Kab. Rokan Hulu	5,935	0	5,935
89	Kab. Siak	7,906	0	7,906
90	Kota Dumai	4,401	14,250,000	14,254,401
91	Kota Pekanbaru	6,963	0	6,963
92	Provinsi Jambi	5,695	910,500,000	910,505,695
93	Kab. Batanghari	7,004	0	7,004

No.	Nama Daerah	Utang Transfer ke Daerah		Total Utang Transfer ke Daerah
		DBH	DAK Nonfisik	
94	Kab. Bungo	3,655	0	3,655
95	Kab. Kerinci	5,809	788,750,000	788,755,809
96	Kab. Merangin	4,408	201,600,000	201,604,408
97	Kab. Muaro Jambi	7,762	0	7,762
98	Kab. Sarolangun	6,948	0	6,948
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	8,742	11,279,733,720	11,279,742,462
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	6,171	0	6,171
101	Kab. Tebo	9,930	0	9,930
102	Kota Jambi	5,057	0	5,057
103	Kota Sungai Penuh	4,351	74,250,000	74,254,351
104	Provinsi Sumatera Selatan	8,927	0	8,927
105	Kab. Banyuasin	8,050	0	8,050
106	Kab. Empat Lawang	5,662	343,000,550	343,006,212
107	Kab. Lahat	8,289	0	8,289
108	Kab. Muara Enim	8,349	179,250,000	179,258,349
109	Kab. Musi Banyuasin	11,115	0	11,115
110	Kab. Musi Rawas	6,459	763,621,345	763,627,804
111	Kab. Musi Rawas Utara	10,724	0	10,724
112	Kab. Ogan Ilir	4,618	0	4,618
113	Kab. Ogan Komering Ilir	5,778	0	5,778
114	Kab. Ogan Komering Ulu	6,975	0	6,975
115	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	2,474	102,535,855	102,538,329
116	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	5,658	105,250,000	105,255,658
117	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	6,772	0	6,772
118	Kota Lubuk Linggau	3,781	0	3,781
119	Kota Pagar Alam	6,213	0	6,213
120	Kota Palembang	6,945	0	6,945
121	Kota Prabumulih	8,163	0	8,163
122	Provinsi Bengkulu	6,253	0	6,253
123	Kab. Bengkulu Selatan	4,694	0	4,694
124	Kab. Bengkulu Tengah	2,742	0	2,742
125	Kab. Bengkulu Utara	4,523	295,680,000	295,684,523
126	Kab. Kaur	5,336	625,676,040	625,681,376
127	Kab. Kepahiang	4,000	0	4,000
128	Kab. Lebong	5,843	0	5,843
129	Kab. Mukomuko	3,668	0	3,668
130	Kab. Rejang Lebong	3,179	78,050,000	78,053,179
131	Kab. Seluma	3,669	265,999,050	266,002,719
132	Kota Bengkulu	1,327	0	1,327
133	Provinsi Lampung	5,079	46,937,580	46,942,659
134	Kab. Lampung Barat	3,637	540,675,679	540,679,316
135	Kab. Lampung Selatan	5,771	0	5,771
136	Kab. Lampung Tengah	6,984	158,000,000	158,006,984
137	Kab. Lampung Timur	9,904	580,844,629	580,854,533
138	Kab. Lampung Utara	4,562	10,930,001	10,934,563
139	Kab. Mesuji	6,651	0	6,651
140	Kab. Pesawaran	5,734	1,334,250,000	1,334,255,734
141	Kab. Pesisir Barat	7,365	586,000,000	586,007,365

No.	Nama Daerah	Utang Transfer ke Daerah		Total Utang Transfer ke Daerah
		DBH	DAK Nonfisik	
142	Kab. Pringsewu	6,079	63,030,000	63,036,079
143	Kab. Tanggamus	4,634	162,190,050	162,194,684
144	Kab. Tulang Bawang	5,690	398,319,455	398,325,145
145	Kab. Tulang Bawang Barat	4,012	330,820,208	330,824,220
146	Kab. Way Kanan	4,265	145,298,600	145,302,865
147	Kota Bandar Lampung	4,600	1,178,056,462	1,178,061,062
148	Kota Metro	4,755	0	4,755
149	Provinsi DKI Jakarta	8,295	0	8,295
150	Provinsi Jawa Barat	6,735	1,491,750,000	1,491,756,735
151	Kab. Bandung	4,500	2,501,874,050	2,501,878,550
152	Kab. Bandung Barat	5,314	1,626,250,000	1,626,255,314
153	Kab. Bekasi	7,485	5,460,000	5,467,485
154	Kab. Bogor	5,485	0	5,485
155	Kab. Ciamis	4,204	1,512,235,500	1,512,239,704
156	Kab. Cianjur	4,561	0	4,561
157	Kab. Cirebon	3,663	254,500,001	254,503,664
158	Kab. Garut	2,623	0	2,623
159	Kab. Indramayu	4,727	466,931,700	466,936,427
160	Kab. Karawang	7,050	0	7,050
161	Kab. Kuningan	3,169	106,000,000	106,003,169
162	Kab. Majalengka	4,774	1,522,136,950	1,522,141,724
163	Kab. Pangandaran	4,214	212,062,500	212,066,714
164	Kab. Purwakarta	5,841	0	5,841
165	Kab. Subang	8,780	0	8,780
166	Kab. Sukabumi	8,818	554,500,000	554,508,818
167	Kab. Sumedang	4,348	0	4,348
168	Kab. Tasikmalaya	4,478	36,750,000	36,754,478
169	Kota Bandung	7,005	0	7,005
170	Kota Banjar	4,683	144,500,001	144,504,684
171	Kota Bekasi	2,531	268,500,000	268,502,531
172	Kota Bogor	3,514	629,163,300	629,166,814
173	Kota Cimahi	3,092	0	3,092
174	Kota Cirebon	3,320	0	3,320
175	Kota Depok	2,961	0	2,961
176	Kota Sukabumi	2,657	42,000,000	42,002,657
177	Kota Tasikmalaya	4,634	86,500,000	86,504,634
178	Provinsi Jawa Tengah	4,254	0	4,254
179	Kab. Banjarnegara	7,336	0	7,336
180	Kab. Banyumas	2,820	0	2,820
181	Kab. Batang	4,011	0	4,011
182	Kab. Blora	4,131	0	4,131
183	Kab. Boyolali	1,860	339,024,124	339,025,984
184	Kab. Brebes	2,510	3,225,025,680	3,225,028,190
185	Kab. Cilacap	2,133	0	2,133
186	Kab. Demak	2,507	3,862,402,320	3,862,404,827
187	Kab. Grobogan	3,790	0	3,790
188	Kab. Jepara	6,382	168,865,228	168,871,610
189	Kab. Karanganyar	3,994	0	3,994

No.	Nama Daerah	Utang Transfer ke Daerah		Total Utang Transfer ke Daerah
		DBH	DAK Nonfisik	
190	Kab. Kebumen	3,921	0	3,921
191	Kab. Kendal	2,962	2,134,000,000	2,134,002,962
192	Kab. Klaten	2,723	0	2,723
193	Kab. Kudus	1,759	0	1,759
194	Kab. Magelang	1,855	852,000	853,855
195	Kab. Pati	5,052	0	5,052
196	Kab. Pekalongan	2,660	0	2,660
197	Kab. Pemalang	2,889	1,226,206,000	1,226,208,889
198	Kab. Purbalingga	3,043	337,055,158	337,058,201
199	Kab. Purworejo	3,283	0	3,283
200	Kab. Rembang	2,684	0	2,684
201	Kab. Semarang	2,706	0	2,706
202	Kab. Sragen	3,632	0	3,632
203	Kab. Sukoharjo	3,151	0	3,151
204	Kab. Tegal	2,776	345,599,420	345,602,196
205	Kab. Temanggung	3,916	208,563,182	208,567,098
206	Kab. Wonogiri	1,606	65,045,673	65,047,279
207	Kab. Wonosobo	2,412	729,069,448	729,071,860
208	Kota Magelang	1,737	0	1,737
209	Kota Pekalongan	2,257	28,750,000	28,752,257
210	Kota Salatiga	3,767	0	3,767
211	Kota Semarang	3,300	46,030,000	46,033,300
212	Kota Surakarta	1,185	0	1,185
213	Kota Tegal	2,172	110,000,000	110,002,172
214	Provinsi DI Yogyakarta	5,478	0	5,478
215	Kab. Bantul	1,040	322,750,000	322,751,040
216	Kab. gunung kidul	1,096	240,574,615	240,575,711
217	Kab. Kulon Progo	758	191,465,000	191,465,758
218	Kab. Sleman	2,107	0	2,107
219	Kota Yogyakarta	404	0	404
220	Provinsi Jawa Timur	11,547	0	11,547
221	Kab. Bangkalan	4,754	0	4,754
222	Kab. Banyuwangi	4,114	0	4,114
223	Kab. Blitar	6,794	0	6,794
224	Kab. Bojonegoro	8,291	0	8,291
225	Kab. Bondowoso	2,539	0	2,539
226	Kab. Gresik	7,554	0	7,554
227	Kab. Jember	3,884	0	3,884
228	Kab. Jombang	8,894	0	8,894
229	Kab. Kediri	3,868	524,125,000	524,128,868
230	Kab. Lamongan	6,905	0	6,905
231	Kab. Lumajang	4,600	87,370,942	87,375,542
232	Kab. Madiun	8,889	0	8,889
233	Kab. Magetan	4,060	158,220,737	158,224,797
234	Kab. Malang	5,284	640,472,203	640,477,487
235	Kab. Mojokerto	4,726	234,750,000	234,754,726
236	Kab. Nganjuk	6,902	0	6,902
237	Kab. Ngawi	8,081	0	8,081

No.	Nama Daerah	Utang Transfer ke Daerah		Total Utang Transfer ke Daerah
		DBH	DAK Nonfisik	
238	Kab. Pacitan	5,180	485,250,000	485,255,180
239	Kab. Pamekasan	4,600	0	4,600
240	Kab. Pasuruan	5,635	281,295,000	281,300,635
241	Kab. Ponorogo	5,410	0	5,410
242	Kab. Probolinggo	3,674	0	3,674
243	Kab. Sampang	3,655	362,000,000	362,003,655
244	Kab. Sidoarjo	1,748	488,085,005	488,086,753
245	Kab. Situbondo	6,121	0	6,121
246	Kab. Sumenep	5,336	91,616,001	91,621,337
247	Kab. Trenggalek	5,141	0	5,141
248	Kab. Tuban	7,329	469,750,000	469,757,329
249	Kab. Tulungagung	3,619	0	3,619
250	Kota Batu	3,250	0	3,250
251	Kota Blitar	4,822	0	4,822
252	Kota Kediri	2,394	72,475,000	72,477,394
253	Kota Madiun	3,191	26,314,715	26,317,906
254	Kota Malang	3,454	237,981,751	237,985,205
255	Kota Mojokerto	3,331	0	3,331
256	Kota Pasuruan	2,420	24,590,000	24,592,420
257	Kota Probolinggo	3,690	0	3,690
258	Kota Surabaya	6,877	35,081,778	35,088,655
259	Provinsi Kalimantan Barat	5,886	0	5,886
260	Kab. Bengkayang	5,775	0	5,775
261	Kab. Kapuas Hulu	5,090	272,312,500	272,317,590
262	Kab. Kayong Utara	2,920	165,430,050	165,432,970
263	Kab. Ketapang	6,455	3,259,939,448	3,259,945,903
264	Kab. Kubu Raya	5,983	232,042,340	232,048,323
265	Kab. Landak	5,964	0	5,964
266	Kab. Melawi	4,479	2,420,988,568	2,420,993,047
267	Kab. Mempawah	6,322	126,500,000	126,506,322
268	Kab. Sambas	6,860	520,696,188	520,703,048
269	Kab. Sanggau	5,813	440,664,500	440,670,313
270	Kab. Sekadau	6,385	188,262,500	188,268,885
271	Kab. Sintang	3,530	0	3,530
272	Kota Pontianak	4,391	0	4,391
273	Kota Singkawang	1,846	12,900,000	12,901,846
274	Provinsi Kalimantan Tengah	6,499	0	6,499
275	Kab. Barito Selatan	1,887	0	1,887
276	Kab. Barito Timur	5,415	119,500,000	119,505,415
277	Kab. Barito Utara	6,482	0	6,482
278	Kab. Gunung Mas	4,565	0	4,565
279	Kab. Kapuas	7,622	0	7,622
280	Kab. Katingan	6,461	0	6,461
281	Kab. Kotawaringin Barat	3,666	0	3,666
282	Kab. Kotawaringin Timur	4,560	2,001,084,249	2,001,088,809
283	Kab. Lamandau	5,351	27,500,000	27,505,351
284	Kab. Murung Raya	4,956	37,000,050	37,005,006
285	Kab. Pulang Pisau	5,186	0	5,186

No.	Nama Daerah	Utang Transfer ke Daerah		Total Utang Transfer ke Daerah
		DBH	DAK Nonfisik	
286	Kab. Seruyan	4,316	0	4,316
287	Kab. Sukamara	3,509	256,000,000	256,003,509
288	Kota Palangkaraya	4,151	0	4,151
289	Provinsi Kalimantan Selatan	9,993	0	9,993
290	Kab. Balangan	5,600	0	5,600
291	Kab. Banjar	6,487	2,073,859,700	2,073,866,187
292	Kab. Barito Kuala	4,520	4,013,000	4,017,520
293	Kab. Hulu Sungai Selatan	3,376	0	3,376
294	Kab. Hulu Sungai Tengah	4,569	16,628,700	16,633,269
295	Kab. Hulu Sungai Utara	5,284	30,875,000	30,880,284
296	Kab. Kotabaru	7,750	0	7,750
297	Kab. Tabalong	4,845	59,205,000	59,209,845
298	Kab. Tanah Bumbu	6,582	324,590,440	324,597,022
299	Kab. Tanah Laut	6,256	171,900,550	171,906,806
300	Kab. Tapin	4,815	1,770,932	1,775,747
301	Kota Banjarbaru	4,955	0	4,955
302	Kota Banjarmasin	2,801	0	2,801
303	Provinsi Kalimantan Timur	8,215	1,361,142,411	1,361,150,626
304	Kab. Berau	7,993	828,070,595	828,078,588
305	Kab. Kutai Barat	7,345	0	7,345
306	Kab. Kutai Kartanegara	9,667	0	9,667
307	Kab. Kutai Timur	10,199	0	10,199
308	Kab. Mahakam Ulu	5,492	15,248,500	15,253,992
309	Kab. Paser	7,974	0	7,974
310	Kab. Penajam Paser Utara	7,978	275,108,500	275,116,478
311	Kota Balikpapan	8,899	378,000,000	378,008,899
312	Kota Bontang	6,981	295,342,949	295,349,930
313	Kota Samarinda	5,473	0	5,473
314	Provinsi Sulawesi Utara	6,627	0	6,627
315	Kab. Bolaang Mongondow	3,064	39,675,000	39,678,064
316	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2,117	535,914,550	535,916,667
317	Kab. Bolaang Mongondow Timur	3,015	164,000,000	164,003,015
318	Kab. Bolaang Mongondow Utara	3,270	0	3,270
319	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	3,349	348,000,050	348,003,399
320	Kab. Kepulauan Talaud	2,860	250,250,000	250,252,860
321	Kab. Minahasa	3,231	0	3,231
322	Kab. Minahasa Selatan	5,217	58,931,600	58,936,817
323	Kab. Minahasa Tenggara	5,706	232,500,000	232,505,706
324	Kab. Minahasa Utara	5,098	0	5,098
325	Kab. Sangihe	3,421	8,500,000	8,503,421
326	Kota Bitung	2,844	39,000,000	39,002,844
327	Kota Kotamobagu	2,243	7,750,000	7,752,243
328	Kota Manado	3,646	258,500,000	258,503,646
329	Kota Tomohon	4,666	0	4,666
330	Provinsi Sulawesi Tengah	13,007	0	13,007
331	Kab. Banggai	7,205	0	7,205
332	Kab. Banggai Kepulauan	5,743	0	5,743
333	Kab. Banggai Laut	6,876	0	6,876

No.	Nama Daerah	Utang Transfer ke Daerah		Total Utang Transfer ke Daerah
		DBH	DAK Nonfisik	
334	Kab. Buol	6,264	0	6,264
335	Kab. Donggala	6,569	150,447,400	150,453,969
336	Kab. Morowali	6,971	0	6,971
337	Kab. Morowali Utara	8,320	138,850,000	138,858,320
338	Kab. Parigi Moutong	5,429	0	5,429
339	Kab. Poso	6,738	0	6,738
340	Kab. Sigi	3,808	880,474,400	880,478,208
341	Kab. Tojo Una Una	5,309	116,000,000	116,005,309
342	Kab. Tolitoli	4,229	0	4,229
343	Kota Palu	7,119	336,422,000	336,429,119
344	Provinsi Sulawesi Selatan	4,661	1,875,000,000	1,875,004,661
345	Kab. Bantaeng	3,658	28,500,000	28,503,658
346	Kab. Barru	2,478	210,663,000	210,665,478
347	Kab. Bone	2,668	6,960,703	6,963,371
348	Kab. Bulukumba	3,940	96,000,000	96,003,940
349	Kab. Enrekang	2,852	944,063,973	944,066,825
350	Kab. Gowa	3,054	776,000,000	776,003,054
351	Kab. Jeneponto	2,231	0	2,231
352	Kab. Kepulauan Selayar	2,699	0	2,699
353	Kab. Luwu	3,339	0	3,339
354	Kab. Luwu Timur	3,778	462,500,000	462,503,778
355	Kab. Luwu Utara	3,908	676,652,273	676,656,181
356	Kab. Maros	2,861	0	2,861
357	Kab. Pangkajene Kepulauan	1,750	524,818,540	524,820,290
358	Kab. Pinrang	2,170	142,500,000	142,502,170
359	Kab. Sidenreng Rappang	3,207	3,045,050	3,048,257
360	Kab. Sinjai	3,701	263,995,050	263,998,751
361	Kab. Soppeng	3,106	0	3,106
362	Kab. Takalar	2,217	187,275,828	187,278,045
363	Kab. Tana Toraja	4,613	0	4,613
364	Kab. Toraja Utara	3,765	0	3,765
365	Kab. Wajo	4,436	119,500,001	119,504,437
366	Kota Makassar	5,840	0	5,840
367	Kota Palopo	1,974	16,500,001	16,501,975
368	Kota Parepare	1,796	0	1,796
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	9,069	237,825,171	237,834,240
370	Kab. Bombana	6,032	0	6,032
371	Kab. Buton	3,810	0	3,810
372	Kab. Buton Selatan	4,251	341,438,210	341,442,461
373	Kab. Buton Tengah	4,062	174,614,600	174,618,662
374	Kab. Buton Utara	3,110	384,019,720	384,022,830
375	Kab. Kolaka	4,952	0	4,952
376	Kab. Kolaka Timur	3,849	448,009,180	448,013,029
377	Kab. Kolaka Utara	6,343	58,670,100	58,676,443
378	Kab. Konawe	6,538	1,565,743,130	1,565,749,668
379	Kab. Konawe Kepulauan	3,051	226,331,730	226,334,781
380	Kab. Konawe Selatan	6,380	178,325,400	178,331,780
381	Kab. Konawe Utara	4,427	16,500,000	16,504,427

No.	Nama Daerah	Utang Transfer ke Daerah		Total Utang Transfer ke Daerah
		DBH	DAK Nonfisik	
382	Kab. Muna	3,672	1,480,042,436	1,480,046,108
383	Kab. Muna Barat	2,467	223,899,060	223,901,527
384	Kab. Wakatobi	3,259	0	3,259
385	Kota Bau0bau	2,557	0	2,557
386	Kota Kendari	3,631	0	3,631
387	Provinsi Bali	2,491	0	2,491
388	Kab. Badung	2,294	0	2,294
389	Kab. Bangli	830	0	830
390	Kab. Buleleng	804	44,000,000	44,000,804
391	Kab. Gianyar	1,924	0	1,924
392	Kab. Jembrana	2,021	2,828,912,217	2,828,914,238
393	Kab. Karangasem	901	383,468,581	383,469,482
394	Kab. Klungkung	735	79,375,500	79,376,235
395	Kab. Tabanan	754	0	754
396	Kota Denpasar	3,613	6,745,668,210	6,745,671,823
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	4,109	3,496,906,167	3,496,910,276
398	Kab. Bima	2,639	0	2,639
399	Kab. Dompu	2,215	0	2,215
400	Kab. Lombok Barat	2,533	216,750,000	216,752,533
401	Kab. Lombok Tengah	4,003	2,535,227,240	2,535,231,243
402	Kab. Lombok Timur	4,406	0	4,406
403	Kab. Lombok Utara	4,331	0	4,331
404	Kab. Sumbawa	4,327	29,827,800	29,832,127
405	Kab. Sumbawa Barat	2,509	379,750,000	379,752,509
406	Kota Bima	282	0	282
407	Kota Mataram	1,732	265,131,135	265,132,867
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	5,668	1,660,598,025	1,660,603,693
409	Kab. Alor	2,699	0	2,699
410	Kab. Belu	1,946	77,769,100	77,771,046
411	Kab. Ende	1,343	0	1,343
412	Kab. Flores Timur	2,257	0	2,257
413	Kab. Kupang	2,472	576,739,220	576,741,692
414	Kab. Lembata	2,222	2,417,310,480	2,417,312,702
415	Kab. Malaka	3,742	624,693,282	624,697,024
416	Kab. Manggarai	3,289	982,988,800	982,992,089
417	Kab. Manggarai Barat	2,205	0	2,205
418	Kab. Manggarai Timur	3,415	2,306,529,520	2,306,532,935
419	Kab. Nagekeo	2,189	878,628,125	878,630,314
420	Kab. Ngada	2,227	237,250,000	237,252,227
421	Kab. Rote Ndao	2,006	2,594,755,415	2,594,757,421
422	Kab. Sabu Raijua	1,803	2,420,370,600	2,420,372,403
423	Kab. Sikka	3,240	1,280,145,319	1,280,148,559
424	Kab. Sumba Barat	3,528	63,814,000	63,817,528
425	Kab. Sumba Barat Daya	2,993	257,250,000	257,252,993
426	Kab. Sumba Tengah	1,516	41,875,050	41,876,566
427	Kab. Sumba Timur	2,358	0	2,358
428	Kab. Timor Tengah Selatan	1,411	0	1,411
429	Kab. Timor Tengah Utara	3,605	1,822,000,000	1,822,003,605

No.	Nama Daerah	Utang Transfer ke Daerah		Total Utang Transfer ke Daerah
		DBH	DAK Nonfisik	
430	Kota Kupang	1,708	431,226,736	431,228,444
431	Provinsi Maluku	3,492	0	3,492
432	Kab. Buru	1,294	0	1,294
433	Kab. Buru Selatan	1,251	364,250,000	364,251,251
434	Kab. Kepulauan Aru	1,246	0	1,246
435	Kab. Maluku Barat Daya	3,593	0	3,593
436	Kab. Maluku Tengah	3,322	0	3,322
437	Kab. Maluku Tenggara	995	100,928,500	100,929,495
438	Kab. Kepulauan Tanimbar	2,814	785,000,000	785,002,814
439	Kab. Seram Bagian Barat	2,425	862,250,000	862,252,425
440	Kab. Seram Bagian Timur	1,523	0	1,523
441	Kota Ambon	886	102,248,018	102,248,904
442	Kota Tual	1,374	250,000	251,374
443	Provinsi Papua	2,514	5,055,272,058	5,055,274,572
444	Kab. Asmat	2,795	3,018,429,680	3,018,432,475
445	Kab. Biak Numfor	2,111	1,889,323,520	1,889,325,631
446	Kab. Boven Digoel	2,643	100,234,998	100,237,641
447	Kab. Deiyai	2,839	302,250,000	302,252,839
448	Kab. Dogiyai	3,936	562,506,000	562,509,936
449	Kab. Intan Jaya	3,280	0	3,280
450	Kab. Jayapura	1,199	843,557,380	843,558,579
451	Kab. Jayawijaya	1,833	1,104,671,000	1,104,672,833
452	Kab. Keerom	3,637	228,424,720	228,428,357
453	Kab. Kepulauan Yapen	1,919	1,884,305,500	1,884,307,419
454	Kab. Lanny Jaya	2,825	88,183,000	88,185,825
455	Kab. Mamberamo Raya	1,863	560,723,780	560,725,643
456	Kab. Mamberamo Tengah	1,144	90,000,000	90,001,144
457	Kab. Mappi	3,593	1,528,817,380	1,528,820,973
458	Kab. Merauke	3,462	0	3,462
459	Kab. Mimika	3,096	5,821,333,511	5,821,336,607
460	Kab. Nabire	3,805	1,364,093,080	1,364,096,885
461	Kab. Nduga	2,964	0	2,964
462	Kab. Paniai	2,787	7,650,000	7,652,787
463	Kab. Pegunungan Bintang	2,691	0	2,691
464	Kab. Puncak	3,491	0	3,491
465	Kab. Puncak Jaya	3,089	0	3,089
466	Kab. Sarmi	1,771	1,300,807,580	1,300,809,351
467	Kab. Supiori	2,304	767,088,660	767,090,964
468	Kab. Tolikara	2,248	467,421,520	467,423,768
469	Kab. Waropen	3,459	0	3,459
470	Kab. Yahukimo	2,331	0	2,331
471	Kab. Yalimo	2,693	0	2,693
472	Kota Jayapura	2,026	360,000,000	360,002,026
473	Provinsi Maluku Utara	4,086	280,000,000	280,004,086
474	Kab. Halmahera Barat	1,829	16,250,000	16,251,829
475	Kab. Halmahera Selatan	5,728	0	5,728
476	Kab. Halmahera Tengah	4,258	192,000,000	192,004,258
477	Kab. Halmahera Timur	2,569	0	2,569

No.	Nama Daerah	Utang Transfer ke Daerah		Total Utang Transfer ke Daerah
		DBH	DAK Nonfisik	
478	Kab. Halmahera Utara	1,140	7,138,800	7,139,940
479	Kab. Kepulauan Sula	1,277	0	1,277
480	Kab. Pulau Morotai	1,159	12,000,000	12,001,159
481	Kab. Pulau Taliabu	1,258	818,196,000	818,197,258
482	Kota Ternate	2,033	58,500,000	58,502,033
483	Kota Tidore Kepulauan	3,895	39,690,400	39,694,295
484	Provinsi Banten	10,482	0	10,482
485	Kab. Lebak	9,487	0	9,487
486	Kab. Pandeglang	3,901	193,500,000	193,503,901
487	Kab. Serang	9,275	743,023,175	743,032,450
488	Kab. Tangerang	3,316	1,433,411,482	1,433,414,798
489	Kota Cilegon	3,403	0	3,403
490	Kota Serang	1,666	0	1,666
491	Kota Tangerang	3,905	0	3,905
492	Kota Tangerang Selatan	3,235	0	3,235
493	Provinsi Bangka Belitung	3,824	0	3,824
494	Kab. Bangka	4,112	17,787,500	17,791,612
495	Kab. Bangka Barat	5,094	231,287,500	231,292,594
496	Kab. Bangka Selatan	4,815	54,750,000	54,754,815
497	Kab. Bangka Tengah	5,389	2,267,967,848	2,267,973,237
498	Kab. Belitung	3,846	0	3,846
499	Kab. Belitung Timur	2,236	260,750,500	260,752,736
500	Kota Pangkal Pinang	4,437	97,067,695	97,072,132
501	Provinsi Gorontalo	4,612	0	4,612
502	Kab. Boalemo	3,702	292,709,415	292,713,117
503	Kab. Bone Bolango	2,350	64,500,000	64,502,350
504	Kab. Gorontalo	2,191	453,069,698	453,071,889
505	Kab. Gorontalo Utara	2,499	191,695,044	191,697,543
506	Kab. Pohuwato	3,927	0	3,927
507	Kota Gorontalo	2,017	0	2,017
508	Provinsi Kepulauan Riau	5,891	1,168,438,404	1,168,444,295
509	Kab. Bintan	1,824	400,500,001	400,501,825
510	Kab. Karimun	4,224	0	4,224
511	Kab. Kepulauan Anambas	8,461	152,000,000	152,008,461
512	Kab. Lingga	3,225	73,250,000	73,253,225
513	Kab. Natuna	6,334	228,000,000	228,006,334
514	Kota Batam	5,097	1,147,184,697	1,147,189,794
515	Kota Tanjung Pinang	1,675	0	1,675
516	Provinsi Papua Barat	9,751	3,174,120,000	3,174,129,751
517	Kab. Fak Fak	8,685	2,451,035,800	2,451,044,485
518	Kab. Kaimana	6,452	890,248,540	890,254,992
519	Kab. Manokwari	4,697	152,857,000	152,861,697
520	Kab. Manokwari Selatan	6,447	121,500,000	121,506,447
521	Kab. Maybrat	5,508	1,252,452,500	1,252,458,008
522	Kab. Pegunungan Arfak	5,079	192,000,000	192,005,079
523	Kab. Raja Ampat	6,174	0	6,174
524	Kab. Sorong	5,657	168,000,000	168,005,657
525	Kab. Sorong Selatan	8,558	211,250,000	211,258,558

No.	Nama Daerah	Utang Transfer ke Daerah		Total Utang Transfer ke Daerah
		DBH	DAK Nonfisik	
526	Kab. Tambrauw	5,108	142,500,000	142,505,108
527	Kab. Teluk Bintuni	7,172	4,377,716,140	4,377,723,312
528	Kab. Teluk Wondama	4,606	37,250,000	37,254,606
529	Kota Sorong	4,821	56,686,600	56,691,421
530	Provinsi Sulawesi Barat	3,089	363,763,889	363,766,978
531	Kab. Majene	2,289	442,871,400	442,873,689
532	Kab. Mamasa	2,204	753,343,385	753,345,589
533	Kab. Mamuju	3,902	238,000,000	238,003,902
534	Kab. Mamuju Tengah	2,131	329,850,000	329,852,131
535	Kab. Pasangkayu	2,160	0	2,160
536	Kab. Polewali Mandar	371	0	371
537	Provinsi Kalimantan Utara	7,518	2,037,720,690	2,037,728,208
538	Kab. Bulungan	5,886	0	5,886
539	Kab. Malinau	6,352	324,099,488	324,105,840
540	Kab. Nunukan	4,359	0	4,359
541	Kab. Tana Tidung	5,505	0	5,505
542	Kota Tarakan	2,662	0	2,662
Total		**2,356,367**	**200,959,099,252**	**200,961,455,619**

Utang SBN Jangka Pendek dan Bagian Lancar SBN Jangka Panjang Rupiah

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Outstanding	Tingkat Bunga (%)	Unamortized Premium (+)/ Discount(-)	Book Value
I. SBN YANG DIPERDAGANGKAN			440,240,942,000,000		-393,106,944,000	439,847,835,056,000
A.SURAT UTANG NEGARA			277,818,923,000,000		-353,709,402,000	277,465,213,598,000
Zero Coupon			27,792,000,000,000		-425,123,903,000	27,366,876,097,000
1	SPN03240214	14-02-2024	40,000,000,000		-291,580,000	39,708,420,000
2	SPN12240104	04-01-2024	4,500,000,000,000		-2,548,363,000	4,497,451,637,000
3	SPN12240201	01-02-2024	5,602,000,000,000		-25,410,630,000	5,576,589,370,000
4	SPN12240229	29-02-2024	5,900,000,000,000		-50,084,414,000	5,849,915,586,000
5	SPN12240328	28-03-2024	1,350,000,000,000		-16,882,740,000	1,333,117,260,000
6	SPN12240411	11-04-2024	2,800,000,000,000		-40,041,539,000	2,759,958,461,000
7	SPN12240529	29-05-2024	2,000,000,000,000		-41,237,431,000	1,958,762,569,000
8	SPN12240628	28-06-2024	800,000,000,000		-19,870,800,000	780,129,200,000
9	SPN12240725	25-07-2024	950,000,000,000		-28,852,981,000	921,147,019,000
10	SPN12240822	22-08-2024	700,000,000,000		-23,384,162,000	676,615,838,000
11	SPN12241114	14-11-2024	3,150,000,000,000		-176,519,263,000	2,973,480,737,000
Fixed Coupon			250,026,923,000,000		71,414,501,000	250,098,337,501,000
1	FR0044	15-09-2024	17,140,000,000,000	10.00000	-74,180,505,000	17,065,819,495,000
2	FR0070	15-03-2024	121,790,932,000,000	8.37500	56,836,870,000	121,847,768,870,000
3	FR0077	15-05-2024	70,095,123,000,000	8.12500	88,758,136,000	70,183,881,136,000
4	ORI019	15-02-2024	26,000,868,000,000	5.57000	0	26,000,868,000,000
5	ORI020	15-10-2024	15,000,000,000,000	4.95000	0	15,000,000,000,000
B.SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA			162,422,019,000,000		-39,397,542,000	162,382,621,458,000
Zero Return			3,620,000,000,000		-42,526,682,000	3,577,473,318,000
1	SPNS07052024	07-05-2024	870,000,000,000		-17,953,134,000	852,046,866,000
2	SPNS09042024	09-04-2024	850,000,000,000		-13,413,531,000	836,586,469,000
3	SPNS14022024	14-02-2024	1,900,000,000,000		-11,160,017,000	1,888,839,983,000
Fixed Coupon			158,802,019,000,000		3,129,140,000	158,805,148,140,000
1	PBS026	15-10-2024	60,395,000,000,000	6.62500	228,735,711,000	60,623,735,711,000
2	PBS031	15-07-2024	54,701,300,000,000	4.00000	-225,606,571,000	54,475,693,429,000
3	SR-014	10-03-2024	16,705,080,000,000	5.47000	0	16,705,080,000,000
4	SR-015	10-09-2024	27,000,639,000,000	5.10000	0	27,000,639,000,000
II. SBN YANG TIDAK DIPERDAGANGKAN			40,134,668,798,505		0	40,134,668,798,505
A.SURAT UTANG NEGARA			28,082,864,798,505		0	28,082,864,798,505
			14,295,107,798,505		0	14,295,107,798,505
1	SRBI01	01-02-2024	389,609,241,575	0.10000	0	389,609,241,575
2	SRBI01	01-08-2024	409,089,703,654	0.10000	0	409,089,703,654
3	SU002	01-04-2024	1,107,994,736,975	0.10000	0	1,107,994,736,975
4	SU002	01-10-2024	1,163,394,473,823	0.10000	0	1,163,394,473,823
5	SU004	01-06-2024	2,799,812,251,529	0.10000	0	2,799,812,251,529
6	SU004	01-12-2024	2,939,802,864,106	0.10000	0	2,939,802,864,106
7	SU007	01-02-2024	2,675,807,086,265	0.10000	0	2,675,807,086,265
8	SU007	01-08-2024	2,809,597,440,578	0.10000	0	2,809,597,440,578
Fixed Coupon			0			0
1	FRNT0001	29-08-2023	0	8.00000	0	0
Variable Coupon			13,787,757,000,000		0	13,787,757,000,000
1	SBR011	10-06-2024	13,787,757,000,000	8.00000	0	13,787,757,000,000
B.SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA			12,051,804,000,000		0	12,051,804,000,000
			2,000,000,000,000		0	2,000,000,000,000
1	SDHI-2024A	11-02-2024	2,000,000,000,000	9.04000	0	2,000,000,000,000
Fixed Coupon			138,253,000,000		0	138,253,000,000
1	SW003	45571	100,000,000,000	5.90000	0	100,000,000,000
2	SWR003	10-07-2024	38,253,000,000	11.05000	0	38,253,000,000
Variable Coupon			9,913,551,000,000		0	9,913,551,000,000
1	ST009	10-11-2024	9,913,551,000,000	7.40000	0	9,913,551,000,000
GRAND TOTAL (I + II)			480,375,610,798,505		(393,106,944,000)	479,982,503,854,505

Bagian Lancar SBN Jangka Panjang Valas

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Issued Principle Outstanding	Tingkat Bunga (%)	Accrued Indexation	Indexed Principal Outstanding	Unamortized Premium (+)/ Discount(-)	Nilai Buku
I. SBN YANG DIPERDAGANGKAN			85,773,522,572,443		12,253,883,298,557	98,027,405,871,000	(2,853,536,000)	98,024,552,335,000
A.SURAT UTANG NEGARA			57,485,869,592,443		5,803,786,278,557	63,289,655,871,000	(2,853,536,000)	63,286,802,335,000
Denominasi Euro			15,352,390,000,000		1,733,950,000,000	17,086,340,000,000	(2,161,463,000)	17,084,178,537,000
1	RIEUR0724	18-07-2024	15,352,390,000,000	2.15000	1,733,950,000,000	17,086,340,000,000	(2,161,463,000)	17,084,178,537,000
Denominasi US Dollars			26,539,779,852,443		6,646,180,818,557	33,185,960,671,000	(692,073,000)	33,185,268,598,000
1	RI0124	15-01-2024	19,545,496,265,443	5.87500	6,322,949,648,557	25,868,445,914,000	(464,604,000)	25,867,981,310,000
2	RI0224	11-02-2024	6,994,283,587,000	4.45000	323,231,170,000	7,317,514,757,000	(227,469,000)	7,317,287,288,000
Denominasi Yen			15,593,699,740,000		(2,576,344,540,000)	13,017,355,200,000	-	13,017,355,200,000
1	RIJPY0524	22-05-2024	10,558,747,040,000	0.83000	(1,800,425,840,000)	8,758,321,200,000	-	8,758,321,200,000
2	RIJPY0524A	27-05-2024	3,823,194,700,000	0.33000	(656,220,700,000)	3,166,974,000,000	-	3,166,974,000,000
3	RIJPY0624	07-06-2024	1,211,758,000,000	1.04000	(119,698,000,000)	1,092,060,000,000	-	1,092,060,000,000
B.SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA			28,287,652,980,000		6,450,097,020,000	34,737,750,000,000	-	34,737,750,000,000
Denominasi US Dollars			28,287,652,980,000		6,450,097,020,000	34,737,750,000,000	-	34,737,750,000,000
1	SNI0824	20-08-2024	10,541,250,000,000	3.90000	1,038,000,000,000	11,579,250,000,000	-	11,579,250,000,000
2	SNI24	10-09-2024	17,746,402,980,000	4.35000	5,412,097,020,000	23,158,500,000,000	-	23,158,500,000,000
GRAND TOTAL			85,773,522,572,443		12,253,883,298,557	98,027,405,871,000	(2,853,536,000)	98,024,552,335,000

Outstanding Utang PDN

CREDITOR NAME	CU BASE	JML LOAN	OUTSTANDING BASE	BAGIAN LANCAR IDR *)	UTANG JANGKA PANJANG IDR *)	TOTAL POSISI UTANG IDR *)
BANK DKI	IDR	16	1,016,169,511,081	-	1,016,169,511,081	1,016,169,511,081
BANK MANDIRI	IDR	184	23,065,675,359,381	3,003,866,580,537	20,061,808,778,844	23,065,675,359,381
PT. BNI (PERSERO)	IDR	139	8,993,537,787,843	1,678,684,029,498	7,314,853,758,345	8,993,537,787,843
PT. BTN (PERSERO)	IDR	39	3,159,229,164,125	-	3,159,229,164,125	3,159,229,164,125
TOTAL		339	36,234,611,822,430	4,682,550,610,035	31,552,061,212,395	36,234,611,822,430

Outstanding Utang Program Pinjaman Luar Negeri per Kreditor

CREDITOR NAME	CU BASE	JML LOAN	OUTSTANDING BASE	BAGIAN LANCAR IDR *)	UTANG JANGKA PANJANG IDR *)	TOTAL POSISI UTANG IDR *)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [5] + [6]
ADB	EUR	9	2,378,259,260	12,358,493,831,728	28,277,252,484,750	40,635,746,316,478
	JPY	14	652,791,208,340	4,415,799,220,852	66,872,917,477,126	71,288,716,697,978
	USD	13	1,818,501,200	2,052,356,812,346	26,023,483,218,777	28,075,840,031,123
AFD	EUR	12	1,148,029,121	1,779,617,415,374	17,835,998,475,249	19,615,615,890,624
	USD	3	60,000,000	694,755,000,000	231,585,000,000	926,340,000,000
AIIB	USD	3	1,460,550,000	1,218,137,100,000	21,331,294,350,000	22,549,431,450,000
AUSTRALIA	AUD	1	1,200,000,000	1,055,256,000,000	11,607,816,000,000	12,663,072,000,000
EXIM BANK KOREA	USD	2	160,000,000	0	2,470,240,000,000	2,470,240,000,000
IBRD	EUR	5	2,528,758,231	744,613,686,035	42,462,609,218,770	43,207,222,904,805
	JPY	2	142,770,600,000	672,731,019,612	14,918,675,123,988	15,591,406,143,600
	USD	44	12,752,850,202	11,888,783,220,903	185,002,471,040,519	196,891,254,261,422
IDA	SDR	1	7,054,963	98,122,407,480	48,014,383,189	146,136,790,669
JICA	JPY	31	327,952,465,000	3,669,423,598,404	32,144,953,294,386	35,814,376,892,790
KfW	EUR	12	2,820,603,000	4.72383E+12	43,469,955,615,900	48,193,781,863,020
	USD	5	350,888,294	1,607,479,618,244	3,809,884,755,292	5,417,364,373,536
TOTAL		**157**	**1,150,199,767,610**	**46,979,395,178,097**	**496,507,150,437,947**	**543,486,545,616,044**

Outstanding Utang Project Pinjaman Luar Negeri per Kreditor Per 31 Desember 2023

CREDITOR NAME	CU BASE	JML LOAN	OUTSTANDING BASE	BAGIAN LANCAR IDR *)	UTANG JANGKA PANJANG IDR *)	TOTAL POSISI UTANG IDR *)
ABN AMRO ROTTERDAM	EUR	1	623.214	10.648.441.513	-	10.648.441.513
ADB	JPY	8	38.245.489.421	239.547.943.393	3.937.088.974.317	4.176.636.917.710
	SDR	22	74.790.785	498.876.438.515	1.050.342.875.015	1.549.219.313.530
	USD	32	1.834.074.988	2.063.298.631.812	26.252.985.104.986	28.316.283.736.799
AFD	EUR	3	17.690.496	62.044.400.668	240.221.430.636	302.265.831.304
	USD	5	43.550.453	154.174.501.141	518.200.948.392	672.375.449.533
AIIB	USD	4	552.821.935	406.546.009.039	8.128.471.849.131	8.535.017.858.170
AUSTRALIA	AUD	2	420.201.549	102.893.928.255	4.331.308.131.877	4.434.202.060.131
B A W A G	EUR	2	4.071.162	34.309.991.979	35.251.264.764	69.561.256.743
BANCO SANTANDER	USD	1	9.625.000	-	148.600.375.000	148.600.375.000
BANK MANDIRI SIN	USD	16	548.558.682	2.187.660.863.949	6.281.536.634.242	8.469.197.498.191
BBVA	EUR	1	468.157	4.864.245.548	3.134.842.760	7.999.088.308
BBVAIT	EUR	4	17.332.012	296.140.650.770	-	296.140.650.770
BELGIUM	EUR	4	1.149.435	5.785.862.395	13.853.767.647	19.639.630.042
BLG	EUR	1	10.040.000	42.886.713.400	128.660.140.200	171.546.853.600
BNI LONDON	USD	1	9.625.000	-	148.600.375.000	148.600.375.000
BNI New York	USD	6	186.783.256	401.455.080.400	2.482.291.605.433	2.883.746.685.833
BNI SEOUL	USD	2	19.124.313	147.626.472.073	147.633.800.348	295.260.272.421
BNP PARIBAS, PARIS	CHF	1	39.579.340	484.251.903.264	242.125.951.816	726.377.855.080
	EUR	5	1.120.007.477	29.578.914.973	19.107.249.635.320	19.136.828.550.293
BNPP SINGAPORE	USD	3	79.597.502	280.337.787.254	948.568.047.822	1.228.905.835.076
BPIFAE	EUR	1	14.726.894	136.690.720.000	114.937.998.028	251.628.718.028
BRI-CAYMAN ISLAND	EUR	2	44.053.881	-	752.719.584.814	752.719.584.814
	USD	5	29.697.478	70.413.419.250	388.085.946.062	458.499.365.312
CA CIB LONDON BRANCH	USD	1	19.833.330	306.206.780.635	-	306.206.780.635
CASA OF FRANCE	EUR	1	-	-	-	-
	USD	2	118.363.182	277.067.879.000	1.550.341.283.575	1.827.409.162.575
Ceska Sporitelna	EUR	1	88.406.853	-	1.510.549.542.879	1.510.549.542.879
CIDA	CAD	19	34.482.009	61.660.164.519	340.460.748.291	402.120.912.809
CITIBANK LONDON	EUR	3	2.388.169	40.805.060.848	-	40.805.060.848
COMMERZBANK GERMANY	EUR	3	184.738.830	293.728.577.108	2.862.781.882.962	3.156.510.460.070
CREDIT AGRICOLE CIB	EUR	7	455.332.269	1.404.553.872.086	6.375.408.090.899	7.779.961.962.985
	USD	1	70.833.333	437.438.333.436	656.157.499.537	1.093.595.832.973
CZECH EXPORT BANK	USD	1	91.332.381	201.440.090.037	1.208.640.540.222	1.410.080.630.259

CREDITOR NAME	CU BASE	JML LOAN	OUTSTANDING BASE	BAGIAN LANCAR IDR *)	UTANG JANGKA PANJANG IDR *)	TOTAL POSISI UTANG IDR *)
DEUTSCHE BANK MADRID	EUR	1	2.810.044	12.003.340.775	36.010.021.640	48.013.362.415
DZ BANK AG HONG KONG	EUR	1	6.556.950	-	112.034.277.063	112.034.277.063
	USD	1	7.430.596	32.777.419.442	81.943.548.651	114.720.968.093
EDC	USD	1	5.568.788	85.976.516.388	-	85.976.516.388
EFIC	USD	1	132.140	2.040.109.460	-	2.040.109.460
EKSPORTKREDITT AS	USD	1	71.162.000	156.952.874.000	941.717.244.000	1.098.670.118.000
ERSTE BANK, VIENNA	EUR	4	84.681.649	236.286.486.687	1.210.612.966.380	1.446.899.453.067
EXIM BANK KOREA	KRW	16	349.570.217.870	222.406.224.271	3.940.975.070.561	4.163.381.294.832
	USD	7	2.948.898.710	1.416.330.967.525	44.111.716.209.125	45.528.047.176.650
EXIM BANK OF CHINA	CNY	1	232.512.522	337.301.265.328	168.650.632.947	505.951.898.275
	USD	19	1.420.625.760	2.872.445.322.548	19.060.595.778.681	21.933.041.101.229
EXIMBANK HUNGARY	USD	1	34.358.652	32.149.286.475	498.313.940.363	530.463.226.838
IBRD	USD	67	5.076.902.480	4.886.503.058.876	73.495.794.323.036	78.382.297.381.911
ICO	EUR	9	74.574.372	48.329.996.045	1.225.873.077.012	1.274.203.073.057
	USD	13	30.598.224	195.922.845.032	276.483.130.673	472.405.975.704
IDA	SDR	31	171.484.372	2.062.508.683.156	1.489.625.466.154	3.552.134.149.310
	USD	22	15.924.271	151.133.712.649	94.721.113.650	245.854.826.299
IDB	ACU	25	52.242.088	234.334.697.786	847.809.993.181	1.082.144.690.966
	EUR	1	194.488	-	3.323.088.094	3.323.088.094
	USD	34	1.269.429.007	2.239.024.450.793	17.359.689.985.980	19.598.714.436.773
IFAD	EUR	4	93.432.634	198.514.907.476	1.397.906.845.682	1.596.421.753.157
	SDR	8	88.257.295	130.604.839.309	1.697.560.300.441	1.828.165.139.750
	USD	2	60.926.000	36.173.577.000	904.462.937.000	940.636.514.000
ING BANK AMSTERDAM	EUR	3	158.676.521	989.310.034.243	1.721.890.951.359	2.711.200.985.602
JAICAF	JPY	2	5.310.025.000	115.977.318.030	463.909.272.120	579.886.590.150
JBIC	JPY	1	159.221.635	11.593.090.548	5.794.867.324	17.387.957.872
JICA	JPY	177	850.581.073.056	6.203.182.243.734	86.685.374.420.419	92.888.556.664.154
KDB SINGAPORE	USD	1	16.998.725	65.610.828.973	196.832.486.302	262.443.315.275
KfW	EUR	46	404.955.981	605.842.355.921	6.313.373.223.896	6.919.215.579.817
MUFG SINGAPORE	EUR	1	32.345.326	-	552.663.242.573	552.663.242.573
	USD	4	75.425.444	301.717.090.255	862.776.334.257	1.164.493.424.512
NATIXIS BANQUE	EUR	32	228.723.162	426.836.419.415	3.481.205.295.638	3.908.041.715.053
NIB	EUR	3	5.681.224	11.071.353.886	85.999.973.044	97.071.326.931
PT BNI TOKYO BRANCH	USD	5	97.420.159	53.448.274.100	1.450.621.556.069	1.504.069.830.169
PT MANDIRI CAYMAN IS	EUR	5	110.799.030	222.077.296.172	1.671.072.602.078	1.893.149.898.250
	USD	19	1.095.170.147	1.928.276.171.589	14.980.055.722.386	16.908.331.893.975

CREDITOR NAME	CU BASE	JML LOAN	OUTSTANDING BASE	BAGIAN LANCAR IDR *)	UTANG JANGKA PANJANG IDR *)	TOTAL POSISI UTANG IDR *)
PT MANDIRI HONGKONG	EUR	1	7.340.598	21.484.659.527	103.939.298.830	125.423.958.357
	USD	11	414.723.427	1.256.591.129.850	5.146.323.862.845	6.402.914.992.695
PT. BNI-HONG KONG	USD	4	67.349.592	231.217.371.164	808.592.976.637	1.039.810.347.800
PT. BNI-SINGAPORE	USD	10	16.641.128	214.305.525.147	42.616.853.442	256.922.378.589
RAIFFEISEN BANK INTL	EUR	4	14.508.018	41.806.312.683	206.082.619.521	247.888.932.204
RUSIA FED.	USD	7	108.818.292	410.874.409.360	1.269.171.200.829	1.680.045.610.188
SFD	SAR	5	252.877.992	132.836.514.715	908.252.063.970	1.041.088.578.685
SOCIETE GENERALE	EUR	2	11.041.096	-	188.651.920.229	188.651.920.229
UBS, ZURICH	CHF	1	15.975.686	58.638.595.156	234.554.380.622	293.192.975.778
UNICREDIT BANK AUSTRIA	EUR	27	173.286.005	276.023.625.655	2.684.799.978.826	2.960.823.604.481
US EXIM	USD	3	14.138.925	45.692.846.621	172.598.009.044	218.290.855.664
USAID	USD	79	40.654.360	224.817.747.105	402.844.921.644	627.662.668.749
USDA	USD	4	20.543.532	49.058.157.705	268.113.437.783	317.171.595.488
Grand Total		**898**		**40.170.943.629.834**	**389.770.140.293.973**	**429.941.083.923.807**

Rincian Pendapatan Diterima Di Muka

No.	Penyewa	Sisa Bulan	Pendapatan Diterima Di muka
1	Fitriansyah Pratama Putra	2	433.333
2	MILYARDI SALIM	6	6.289.500
3	MILYARDI SALIM	5	15.195.417
4	TB Muhammad Syamún	7	11.958.333
5	Sukamto Yuwono, Yayasan Syalom Probolinggo	11	49.683.333
6	Taupik Rahmat	6	1.750.000
7	Budiyanto Sartono	8	7.800.000
8	Budiyanto Sartono	8	7.600.000
9	Yanti	8	6.933.333
10	Kurniawan	9	2.625.000
11	Dewi Sulastri	12	40.400.000
12	William Tanoto	14	43.400.000
13	Ng Deni	14	87.500.000
14	Dra. Hj. Srijati Pohan M.Psi (Perpanjangan)	14	81.666.667
15	Milyardi Salim	14	10.290.000
16	Milyardi Salim	14	8.400.000
17	Denny Sumantri	17	46.750.000
18	Faidul Wahab	18	66.600.000
19	Kuswinarti	20	46.666.667
20	Jonathan Wijaya	22	50.416.667
21	Ketua Jemaat GMAHK Di Indonesia (Jemaat Koinonia)	21	21.875.000
22	Ricky Wijaya (PT Siap Kirim)	21	52.500.000
23	Firman	21	37.800.000
24	Jonathan Wijaya	21	42.000.000
25	Syafrudin Mr	22	14.025.000
26	H. Mohammad Suman	24	16.000.000
27	Syahrul	24	43.200.000
28	Karina Santoso (Dir CV. Tirtamas Kreasitama P.)	25	83.416.667
29	Iting Sarwati	29	47.550.333
30	Ricky Wijaya	88	29.333.333
31	Ricky Wijaya	88	30.800.000
32	Wahid Asngari	91	18.958.333
33	H. Samsul, S.E.	6	4.500.000
34	Ricky Wijaya	88	30.800.000
35	Karina Santoso (CV. Tirtamas Kreasitama Pariwara)	34	51.954.833
36	Karina Santoso (CV. Tirtamas Kreasitama P.)	34	25.978.833
37	Ricky Wijaya	88	29.333.333
38	Dede Ajat	32	14.160.000
39	Narsan	94	10.340.000
40	Ricky Wijaya	88	30.800.000

No.	Penyewa	Sisa Bulan	Pendapatan Diterima Di muka
41	Bank Nagari Payakumbuh	35	47.614.583
42	Yorni Wahid	35	5.833.333
43	Ricky Wijaya	88	29.333.333
44	H. Samsul, S.E.	97	75.175.000
45	Dahlan	41	122.262.000
46	Ricky Wijaya	88	31.650.667
47	Ricky Wijaya	88	30.143.667
48	Ricky Wijaya	88	31.650.667
49	Mukhammad Ervan S.	6	1.859.611
50	PT Indomarco Prismatama Makassar	41	496.489.500
51	Ridho Azhari	41	8.569.000
52	Ricky Wijaya	88	30.143.667
53	Ahmad Kosasih	30	55.680.000
54	Dra. Hj. Srijati Pohan, M.Psi.	38	82.178.167
55	Buyung	19	32.597.667
56	Suliono	43	102.125.000
57	LB LIA Payakumbuh	19	128.922.917
58	Ella Widiastuty	10	5.687.500
59	Agus Kusniadi	5	4.818.333
60	ST. Rohmah	10	3.291.667
61	Abdul Basid SP	47	103.668.683
62	William Wijaya	12	30.000.000
63	Soim	12	20.858.000
64	Leo JP Siegers	1	1.212.833
65	Robbie Irawan	1	371.250
66	Agus Ari Wibowo	14	43.789.083
67	Kusmantono	2	709.000
68	Syafrudin	14	3.078.833
69	Ahmad Zakkyuddin	14	44.672.833
70	PT Multi Garment Indonesia	16	27.810.667
71	Yuliana Lingga	111	7.520.250
72	Samsul Roman	3	1.253.750
73	PT Atra Widiya Agung Rd. Kartono Dwidjosewojo	19	35.704.167
74	Mukhammad Ervan S.	9	2.875.330
75	Dahlan	51	64.312.700
76	Harianto	10	906.667
77	Sari Setiyawati	22	7.869.583
78	Nana Dudu	30	12.427.500
79	Kino	8	9.928.000
80	Yayasan Indonesia Raya	20	66.616.668
81	Tsjoe Eng Siong	12	18.332.000
82	Harianto	12	1.300.000

No.	Penyewa	Sisa Bulan	Pendapatan Diterima Di muka
83	Jamal	12	554.000
84	Zaemubah	12	277.000
85	Vinorita Arifin	12	6.751.000
86	Wahidin	12	5.335.000
87	Muhtazan	12	1.392.000
88	Rudiono	12	295.000
89	Nurhadi	12	983.000
90	Herlina	12	1.500.000
91	Carito Adi Prabowo	12	1.021.000
92	Syarif Chanafi	12	54.186.000
Jumlah			**3.131.221.991**

Klasifikasi Utang Pemerintah berdasarkan Jatuh Tempo (Umur Utang)

(Dalam Rupiah)

MATURITY PROFILE	JML PDN	OUTSTANDING	JML PLN	OUTSTANDING	TOTAL OUTSTANDING	JML SBN RUPIAH	OUTSTANDING	OUTSTANDING SBN VALAS	OUTSTANDING SBN VALAS	TOTAL OUTSTANDING SBN
0-5 TAHUN	15	803,419,814,397	37	19,148,152,206,881	19,951,572,021,278	127	2,608,428,018,206,620	44	580,260,826,428,000	3,188,688,844,634,620
6-10 TAHUN	363	35,431,192,008,033	109	117,338,004,635,593	152,769,196,643,626	41	1,558,598,471,000,000	25	309,891,757,061,000	1,868,490,228,061,000
11-15 TAHUN			184	421,405,500,792,149	421,405,500,792,149	16	787,340,524,000,000	6	85,457,149,419,000	872,797,673,419,000
16-20 TAHUN			153	111,362,413,621,148	111,362,413,621,148	11	495,921,343,425,048	5	58,857,262,800,000	554,778,606,225,048
21-25 TAHUN			136	138,424,198,876,328	138,424,198,876,328	5	247,650,702,000,000	6	146,670,500,000,000	394,321,202,000,000
26-30 TAHUN			209	49,093,893,622,125	49,093,893,622,125	2	71,124,385,000,000	10	153,618,050,000,000	224,742,435,000,000
LEBIH DARI 30 TAHUN			237	116,655,465,785,628	116,655,465,785,628			3	37,825,550,000,000	37,825,550,000,000
TOTAL	**378**	**36,234,611,822,430**	**1,065**	**973,427,629,539,851**	**1,009,662,241,362,280**	**202**	**5,769,063,443,631,670**	**99**	**1,372,581,095,708,000**	**7,141,644,539,339,670**

Unamortized Discount / Premium Obligasi Negara Rupiah

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	FR0037	15-Sep-2026	(21,212,322,000.00)	0.00
2	FR0040	15-Sep-2025	(1,825,863,000.00)	155,193,410,000.00
3	FR0042	15-Jul-2027	(44,808,154,000.00)	20,270,491,000.00
4	FR0045	15-May-2037	(28,596,328,000.00)	477,480,745,000.00
5	FR0047	15-Feb-2028	(385,619,742,000.00)	14,664,856,000.00
6	FR0050	15-Jul-2038	(349,793,808,000.00)	106,025,307,000.00
7	FR0052	15-Aug-2030	(169,639,824,000.00)	63,782,376,000.00
8	FR0054	15-Jul-2031	(230,600,715,000.00)	237,195,029,000.00
9	FR0056	15-Sep-2026	(278,932,571,000.00)	744,003,447,000.00
10	FR0057	15-May-2041	(22,194,818,000.00)	908,314,373,000.00
11	FR0058	15-Jun-2032	(27,422,233,000.00)	2,487,331,965,000.00
12	FR0059	15-May-2027	(441,106,077,000.00)	486,874,207,000.00
13	FR0062	15-Apr-2042	(310,005,283,000.00)	86,519,810,000.00
14	FR0064	15-May-2028	(2,295,039,759,000.00)	128,746,513,000.00
15	FR0065	15-May-2033	(2,796,389,763,000.00)	555,225,436,000.00
16	FR0067	15-Feb-2044	(314,326,599,000.00)	836,840,893,000.00
17	FR0068	15-Mar-2034	(1,498,810,041,000.00)	1,140,540,349,000.00
18	FR0071	15-Mar-2029	(98,916,560,000.00)	1,535,370,019,000.00
19	FR0072	15-May-2036	(473,333,414,000.00)	1,992,344,685,000.00
20	FR0073	15-May-2031	(117,160,890,000.00)	2,216,944,183,000.00
21	FR0074	15-Aug-2032	(284,196,669,000.00)	497,590,250,000.00
22	FR0075	15-May-2038	(1,459,089,467,000.00)	941,195,473,000.00
23	FR0076	15-May-2048	(2,478,438,110,000.00)	198,236,093,000.00
24	FR0078	15-May-2029	(141,480,599,000.00)	1,455,160,524,000.00
25	FR0079	15-Apr-2039	(163,525,246,000.00)	1,082,151,414,000.00
26	FR0080	15-Jun-2035	(675,837,176,000.00)	1,288,218,618,000.00
27	FR0081	15-Jun-2025	(515,674,771,000.00)	281,620,541,000.00
28	FR0082	15-Sep-2030	(2,328,115,295,000.00)	840,347,667,000.00
29	FR0083	15-Apr-2040	(604,381,363,000.00)	3,454,176,999,000.00
30	FR0084	15-Feb-2026	(79,047,953,000.00)	0.00
31	FR0085	15-Apr-2031	(113,470,502,000.00)	0.00
32	FR0086	15-Apr-2026	(162,797,697,000.00)	335,963,272,000.00
33	FR0087	15-Feb-2031	(781,527,108,000.00)	1,226,352,670,000.00
34	FR0088	15-Jun-2036	(578,043,206,000.00)	20,750,178,000.00
35	FR0089	15-Aug-2051	(835,095,096,000.00)	443,745,008,000.00
36	FR0090	15-Apr-2027	(1,185,055,913,000.00)	45,694,805,000.00
37	FR0091	15-Apr-2032	(3,729,454,236,000.00)	624,431,219,000.00
38	FR0092	15-Jun-2042	(530,354,436,000.00)	1,617,623,259,000.00
39	FR0093	15-Jul-2037	(485,846,099,000.00)	0.00
40	FR0094	15-Jan-2028	(144,588,576,000.00)	0.00
41	FR0095	15-Aug-2028	(849,513,529,000.00)	321,548,315,000.00
42	FR0096	15-Feb-2033	(635,974,680,000.00)	2,282,279,239,000.00

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
43	FR0097	15-Jun-2043	(103,319,541,000.00)	994,272,343,000.00
44	FR0098	15-Jun-2038	(123,945,463,000.00)	1,793,063,083,000.00
45	FR0099	15-Jan-2029	(6,774,204,000.00)	11,394,371,000.00
46	FR0100	15-Feb-2034	(468,253,416,000.00)	94,031,362,000.00
47	FR0101	15-Apr-2029	(112,008,190,000.00)	126,970,013,000.00
48	FRSDG001	15-Oct-2030	(13,000,966,000.00)	295,551,621,000.00
Grand Total			(29,494,544,271,000.00)	34,466,036,431,000.00

Unamortized Discount / Premium Obligasi Negara Valas

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	RI0035	12-Oct-2035	0.00	437,634,200,000.00
2	RI0037	17-Feb-2037	(90,482,517,000.00)	0.00
3	RI0038	17-Jan-2038	(197,820,843,000.00)	0.00
4	RI0125	15-Jan-2025	(15,975,339,000.00)	0.00
5	RI0126	8-Jan-2026	(23,152,284,000.00)	0.00
6	RI0127	8-Jan-2027	(20,615,244,000.00)	0.00
7	RI0128	11-Jan-2028	(28,685,655,000.00)	0.00
8	RI0128A	11-Jan-2028	(138,234,988,000.00)	0.00
9	RI0133	11-Jan-2033	(341,223,334,000.00)	0.00
10	RI0142	17-Jan-2042	(178,609,851,000.00)	129,317,205,000.00
11	RI0144	15-Jan-2044	(204,287,685,000.00)	0.00
12	RI0145	15-Jan-2045	(200,532,650,000.00)	0.00
13	RI0146	8-Jan-2046	(89,144,433,000.00)	0.00
14	RI0147	8-Jan-2047	(116,718,382,000.00)	0.00
15	RI0148	11-Jan-2048	(157,875,361,000.00)	0.00
16	RI0153	11-Jan-2053	(160,885,735,000.00)	0.00
17	RI0229	11-Feb-2029	(23,100,915,000.00)	0.00
18	RI0230	14-Feb-2030	(26,166,357,000.00)	0.00
19	RI0249	11-Feb-2049	(55,943,060,000.00)	0.00
20	RI0250	14-Feb-2050	(87,545,298,000.00)	0.00
21	RI0331	12-Mar-2031	(58,199,843,000.00)	0.00
22	RI0332	31-Mar-2032	(49,352,272,000.00)	0.00
23	RI0351	12-Mar-2051	(253,866,699,000.00)	0.00
24	RI0352	31-Mar-2052	(84,409,656,000.00)	0.00
25	RI0371	12-Mar-2071	(80,947,024,000.00)	0.00
26	RI0428	24-Apr-2028	(14,632,252,000.00)	0.00
27	RI0443	15-Apr-2043	(186,172,789,000.00)	0.00
28	RI0470	15-Apr-2070	(144,107,012,000.00)	0.00
29	RI0727	18-Jul-2027	(19,403,915,000.00)	0.00
30	RI0731	28-Jul-2031	(46,929,201,000.00)	0.00
31	RI0747	18-Jul-2047	(82,659,320,000.00)	0.00
32	RI0927	20-Sep-2027	(92,897,883,000.00)	0.00
33	RI0929	18-Sep-2029	(26,197,440,000.00)	0.00
34	RI0932	20-Sep-2032	(215,833,054,000.00)	0.00
35	RI0952	20-Sep-2052	(104,191,676,000.00)	0.00
36	RI0961	23-Sep-2061	(155,069,582,000.00)	0.00
37	RI1030	15-Oct-2030	(71,563,468,000.00)	0.00
38	RI1049	30-Oct-2049	(108,067,412,000.00)	0.00
39	RI1050	15-Oct-2050	(193,495,894,000.00)	0.00
40	RIEUR0227	14-Feb-2027	(24,271,532,000.00)	0.00
41	RIEUR0333	12-Mar-2033	(109,118,176,000.00)	0.00
42	RIEUR0334	23-Mar-2034	(39,748,584,000.00)	0.00
43	RIEUR0425	24-Apr-2025	(6,243,726,000.00)	0.00
44	RIEUR0628	14-Jun-2028	(122,877,102,000.00)	0.00
45	RIEUR0725	30-Jul-2025	(43,563,680,000.00)	0.00
46	RIEUR0729	28-Jul-2029	(30,853,762,000.00)	0.00
47	RIEUR0926	18-Sep-2026	(11,576,436,000.00)	0.00
48	RIEUR1031	30-Oct-2031	(13,437,386,000.00)	0.00

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
49	USDFR0003	15-Jan-2032	(218,435,984,000.00)	0.00
Grand Total			(4,765,122,691,000.00)	566,951,405,000.00

Unamortized Discount / Premium SBSN Rupiah

No	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	IFR0006	15-Mar-30	(2,996,660,000)	8,098,737,000.00
2	IFR0007	15-Jan-25	(1,542,117,000)	1,892,821,000.00
3	IFR0010	15-Feb-36	(11,281,414,000)	189,434,285,000.00
4	PBS003	15-Jan-27	(1,018,236,733,000)	70,107,407,000.00
5	PBS004	15-Feb-37	(2,971,580,618,000)	0
6	PBS005	15-Apr-43	(3,854,606,660,000)	0
7	PBS007	15-Sep-40	(11,074,503,000)	396,057,201,000.00
8	PBS012	15-Nov-31	(38,885,873,000)	1,816,767,105,000.00
9	PBS015	15-Jul-47	(761,712,766,000)	348,260,644,000.00
10	PBS017	15-Oct-25	(728,094,744,000)	256,763,223,000.00
11	PBS018	15-May-28	(30,808,153,000)	224,486,686,000.00
12	PBS020	15-Oct-27	(10,217,310,000)	1,934,280,000.00
13	PBS021	15-Nov-26	(1,589,111,000)	162,261,510,000.00
14	PBS022	15-Apr-34	(16,676,003,000)	456,961,480,000.00
15	PBS023	15-May-30	(3,116,952,000)	81,247,723,000.00
16	PBS024	15-May-32	(13,183,751,000)	6,348,011,000.00
17	PBS025	15-May-33	(18,272,779,000)	1,534,945,362,000.00
18	PBS028	15-Oct-46	(100,330,601,000)	3,356,288,979,000.00
19	PBS029	15-Mar-34	(2,214,392,039,000)	24,061,597,000.00
20	PBS030	15-Jul-28	(63,681,523,000)	22,105,759,000.00
21	PBS032	15-Jul-26	(353,146,317,000)	5,186,468,000.00
22	PBS033	15-Jun-47	(1,506,850,650,000)	78,419,928,000.00
23	PBS034	15-Jun-39	(550,259,851,000)	17,551,711,000.00
24	PBS035	15-Mar-42	(56,826,931,000)	5,048,313,000.00
25	PBS036	15-Aug-25	(976,048,560,000)	0
26	PBS037	15-Mar-36	(323,623,569,000)	280,714,890,000.00
27	PBSG001	15-Sep-29	(40,474,477,000)	189,972,701,000.00
28	SW001	10-Mar-25	(591,879,000)	0
29	SW002	30-Jun-27	(1,501,209,000)	0
30	SW006	3-Jul-28	(770,476,000)	0
Grand Total			(15,682,374,229,000	9,534,916,821,000.00

Unamortized Discount / Premium Bagian Lancar Obligasi Negara Rupiah
Tahun 2023

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	FR0044	15-Sep-2024	(75,656,421,000.00)	1,475,916,000.00
2	FR0070	15-Mar-2024	(13,517,626,000.00)	70,354,496,000.00
3	FR0077	15-May-2024	(14,653,516,000.00)	103,411,652,000.00
Grand Total			(103,827,563,000.00)	175,242,064,000.00

Unamortized Discount / Premium Bagian Lancar SBSN Rupiah
Tahun 2023

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	PBS026	15-Oct-2024	(36,041,781,000.00)	264,777,492,000.00
2	PBS031	15-Jul-2024	(225,907,195,000.00)	300,624,000.00
Grand Total			(261,948,976,000.00)	265,078,116,000.00

Unamortized Discount / Premium Bagian Lancar Obligasi Negara Valas
Tahun 2023

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	RI0124	15-Jan-2024	(464,604,000.00)	0.00
2	RI0224	11-Feb-2024	(227,469,000.00)	0.00
4	RIEUR0724	18-Jul-2024	(2,161,463,000.00)	0.00
Grand Total			(2,853,536,000.00)	0.00

Unamortized Discount / Premium SPN
Tahun 2023

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	SPN03240214	14-02-2024	(291,580,000)	0
2	SPN12240104	4-01-2024	(2,548,363,000)	0
3	SPN12240201	1-02-2024	(25,410,630,000)	0
4	SPN12240229	29-02-2024	(50,084,414,000)	0
5	SPN12240328	28-03-2024	(16,882,740,000)	0
6	SPN12240411	11-04-2024	(40,041,539,000)	0
7	SPN12240529	29-05-2024	(41,237,431,000)	0
8	SPN12240628	28-06-2024	(19,870,800,000)	0
9	SPN12240725	25-07-2024	(28,852,981,000)	0
10	SPN12240822	22-08-2024	(23,384,162,000)	0
11	SPN12241114	14-11-2024	(176,519,263,000)	0
Grand Total			(425,123,903,000)	0

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	SPNS07052024	7-05-2024	(17,953,134,000)	0
2	SPNS09042024	9-04-2024	(13,413,531,000)	0
3	SPNS14022024	14-02-2024	(11,160,017,000)	0
Grand Total			(42,526,682,000)	0

Daftar Seri yang diterbitkan sebagai SBN Ditangguhkan

Seri	Tanggal	Amt	AccInt	AmtNet	Disc - Prem	TotCash
PBS003	12/7/2023	4,200,000,000,000	99,292,200,000	4,124,592,217,000	(75,407,783,000)	4,223,884,417,000
PBS036	12/7/2023	500,000,000,000	8,325,500,000	489,848,525,000	(10,151,475,000)	498,174,025,000
PBS037	12/7/2023	550,000,000,000	8,622,350,000	551,270,869,000	1,270,869,000	559,893,219,000
PBS038	12/7/2023	1,300,000,000,000	42,733,600,000	1,285,073,888,000	(14,926,112,000)	1,327,807,488,000
PBSG001	12/7/2023	590,000,000,000	8,912,540,000	587,558,613,000	(2,441,387,000)	596,471,153,000
SPNS04062024	12/7/2023	2,000,000,000,000	-	1,940,200,000,000	(59,800,000,000)	1,940,200,000,000
FR0089	12/14/2023	2,550,000,000,000	57,642,750,000	2,510,940,262,100	(39,059,737,900)	2,568,583,012,100
FR0097	12/14/2023	2,100,000,000,000	74,403,000,000	2,155,581,963,200	55,581,963,200	2,229,984,963,200
FR0098	12/14/2023	1,800,000,000,000	63,774,000,000	1,848,444,655,000	48,444,655,000	1,912,218,655,000
FR0100	12/14/2023	4,300,000,000,000	93,666,900,000	4,263,575,563,000	(36,424,437,000)	4,357,242,463,000
FR0101	12/14/2023	7,300,000,000,000	82,271,000,000	7,352,416,665,000	52,416,665,000	7,434,687,665,000
SPN03240313	12/14/2023	650,000,000,000	-	640,002,375,000	(9,997,625,000)	640,002,375,000
SPN12241212	12/14/2023	300,000,000,000	-	281,210,400,000	(18,789,600,000)	281,210,400,000
PBS036	12/21/2023	1,800,000,000,000	33,652,800,000	1,764,766,013,000	(35,233,987,000)	1,798,418,813,000
PBS037	12/21/2023	800,000,000,000	14,656,800,000	808,286,769,000	8,286,769,000	822,943,569,000
PBS038	12/21/2023	1,050,000,000,000	1,183,350,000	1,038,962,094,400	(11,037,905,600)	1,040,145,444,400
PBSG001	12/21/2023	350,000,000,000	6,179,250,000	348,394,470,000	(1,605,530,000)	354,573,720,000
FR0076	12/27/2023	2,800,000,000,000	23,828,000,000	2,972,762,800,000	172,762,800,000	2,996,590,800,000
FR0080	12/27/2023	1,860,000,000,000	4,573,740,000	1,990,017,720,000	130,017,720,000	1,994,591,460,000
FR0065	12/28/2023	340,000,000,000	2,660,840,000	341,733,660,000	1,733,660,000	344,394,500,000
FR0080	12/28/2023	630,000,000,000	1,678,320,000	676,126,710,000	46,126,710,000	677,805,030,000
FR0088	12/28/2023	550,000,000,000	1,221,000,000	534,251,850,000	(15,748,150,000)	535,472,850,000
FR0093	12/28/2023	750,000,000,000	21,567,750,000	735,005,250,000	(14,994,750,000)	756,573,000,000
						39,891,869,021,700

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT
(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	PENDAPATAN OPERASIONAL	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	TOTAL PENDAPATAN	BEBAN OPERASIONAL	BEBAN NON OPERASIONAL	TOTAL BEBAN	SURPLUS (DEFISIT)	BA
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 =6 + 7	9 = 5 - 8	14
1	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	1,017,309,928	-	1,017,309,928	807,883,820	-	807,883,820	209,426,108	025
2	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL)	2,691,507	255,094,339	257,785,846	5,738,991,762	147,777,839	5,886,769,601	(5,628,983,755)	026
3	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	3,062,882	2,365,837,189	2,368,900,071	8,530,122,356	197637262	8,727,759,618	(6,358,859,547)	026
4	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM)	-	-	-	8,742,281	-	8,742,281	(8,742,281)	033
5	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	2,129,099,661	1,257,664	2,130,357,325	1,641,402,786	-	1,641,402,786	488,954,539	020
6	BadanPengelola Masjid Istiqlal (BPMI)	15,000,000	17,930,972	32,930,972	15,000,000	18,596,914	33,596,914	(665,942)	025
7	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	24,786,657,448	48,285,326	24,834,942,774	25,422,153,099	300,550,081	25,722,703,180	(887,760,406)	025
8	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)	14,244,936	24,952	14,269,888	14,244,936	-	14,244,936	24,952	090
9	Badan Restorasi Gambut	30,237	200,988	231,225	107,961,427	-	107,961,427	(107,730,202)	
10	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	54,284,095,075	-	54,284,095,075	48,095,688,939	-	48,095,688,939	6,188,406,136	025
11	Dewan Energi Nasional (DEN)	-	-	-	24,554,729	-	24,554,729	(24,554,729)	020
12	Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)	-	-	-	13,506,120	-	13,506,120	(13,506,120)	036
13	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun Kepulauan Riau	62,748	627,507	690,255	165,205,819	3,067,899	168,273,718	(167,583,463)	999
14	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	-	-	-	26,672,452	-	26,672,452	(26,672,452)	035
15	Dewan Pers	-	13,009	13,009	25,135,307	-	25,135,307	(25,122,298)	059
16	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	7,100	618	7,718	30,740,633	-	30,740,633	(30,732,915)	007
17	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	-	-	-	13,578,255	-	13,578,255	(13,578,255)	033
18	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	289,613	-	289,613	54,980,390	-	54,980,390	(54,690,777)	048
19	Komisi Informasi Pusat (KIP)	-	140,292	140,292	20,376,595	-	20,376,595	(20,236,303)	059
20	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	-	52,592	52,592	58,869,907	4,956	58,874,863	(58,822,271)	059
21	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	-	-	-	10,405,340	12,483	10,417,823	(10,417,823)	047
22	Komite Keuangan Nasional Syariah (KNKS)	-	21,434	21,434	22,301,306	2,651	22,303,957	(22,282,523)	055
23	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	960	39,262	40,222	31,775,865	-	31,775,865	(31,735,643)	022
24	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)		-	-	3,770,385	-	3,770,385	(3,770,385)	015
25	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	-	-	-	-	-	-	-	024
26	Lembaga Sensor Film (LSF)	2,020,224	113,081	2,133,305	16,025,768	-	16,025,768	(13,892,463)	023
27	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)			-			-	-	024
28	Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)	-		-	12,477,125		12,477,125	(12,477,125)	34
29	Sekretariat Pengadilan Pajak	4,522	-	4,522	78,762,486	-	78,762,486	(78,757,964)	015
30	SKK MIGAS (Satker)	9,255	780,631	789,886	1,686,429,851	1,259,025	1,687,688,876	(1,686,898,990)	999
31	SKK MIGAS (Bukan Satker)	1,702,785,595	-	1,702,785,595	1,813,560,582	3,193,024	1,816,753,606	(113,968,011)	999

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	PENDAPATAN OPERASIONAL	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	TOTAL PENDAPATAN	BEBAN OPERASIONAL	BEBAN NON OPERASIONAL	TOTAL BEBAN	SURPLUS (DEFISIT)	BA
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 =6 + 7	9 = 5 - 8	14
32	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (bukan satker)	8,120,140,406	140,292,550	8,260,432,956	7,261,161,195	262,250,235	7,523,411,430	737,021,526	999
33	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (satker)	-	-	-	2,613,438	5,629,699	8,243,137	(8,243,137)	999
34	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII	44,198,026	330,410	44,528,436	61,517,641	4,537,608	66,055,249	(21,526,813)	007
35	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	65,068,821	-	65,068,821	6,664,419	-	6,664,419	58,404,402	007
36	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba	29,647,538	111,242	29,758,780	27,320,375	111,242	27,431,617	2,327,163	040
37	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur	35,033,860	-	35,033,860	32,468,054	375,753	32,843,807	2,190,053	040
38	Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana	-	-	-	995,610	-	995,610	(995,610)	078
39	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)	-	12,334,558	12,334,558	3,546	10,655,276	10,658,822	1,675,736	-
40	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	-	30,925,037	30,925,037	22,156,615	-	22,156,615	8,768,422	0
41	Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS TN)	1,763,428		1,763,428	1,739,100	-	1,739,100	24,328	0
42	Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN)	-	-	-	1,462,900	-	1,462,900	(1,462,900)	-
43	Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	-	-	-	145,034,500	-	145,034,500	(145,034,500)	-
44	Komite Akreditasi Nasional (KAN)	40,947,000		40,947,000	34,758,804		34,758,804	6,188,196	
45	Komite Cipta Kerja	16,315		16,315	19,708,825,543		19,708,825,543	(19,708,809,228)	
46	Komite Penanganan Covid 19 dan	-	-	-	-	-	-	-	
47	Kantor Staf Presiden	-	-	-	83,316,309	-	83,316,309	(83,316,309)	
	J U M L A H	**92,294,187,085**	**2,874,413,653**	**95,168,600,738**	**121,881,358,370**	**955,661,947**	**122,837,020,317**	**(27,668,419,579)**	

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA LEMBAGA NON STRUKTURAL
DANA APBN DAN NON APBN
(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	Keterangan	BA	Periode Data
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)	7,887,022		7,886,384			7,886,384	638	Bagian satker	007	Tahun 2023 Unaudited
2	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)						0	0	Bukan satker	025	Triwulan III Tahun 2023
3	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL)	2,462,310		2,462,310			2,462,310	0	Bagian satker	050	Tahun 2023 Unaudited
4	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	69,624,640	8,453,103	56,291,394	2,197,183		66,941,680	2,682,960	Satker	026	Tahun 2023 Unaudited
5	Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI)	15,000,000	11,376,105	3,623,895			15,000,000	-	Bagian satker	025	Tahun 2023 Unaudited
6	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	230,924,302	34,353,603	188,282,027	6,901,602		229,537,232	1,387,070	Satker	020	Tahun 2023 Unaudited
7	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	-	0	-	-		0		Bukan satker	025	Tahun 2023 Unaudited
8	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)	24,511,092	6,790,794	5,952,376	-		12,743,170	11,767,922	Satker	090	Semester I TA 2023
9	Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)	793,062		786,367			786,367	6,695	Bagian satker	088	Tahun 2021 Audited
10	Badan Promosi Pariwisata Indonesia						0	0	tidak aktif	040	Tahun 2021 Unaudited
11	Badan Restorasi Gambut	292,657,474	6,368,434	75,804,193	36,015		82,208,642	210,448,832	Satker	029	Semester I TA 2023
12	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	10,000,000	4,112,900	1,683,916	-	4,203,150	9,999,966	34	Bukan satker	025	Tahun 2023 Unaudited
13	Dewan Energi Nasional (DEN)	56,859,949	8,873,970	15,393,665	108,580		24,376,215	32,483,734	Satker	020	Semester I TA 2023
14	Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)	14,084,237		13,327,041	171,384		13,498,425	585,812	Satker	036	Tahun 2023 Unaudited
15	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun	246,442,623				236,602,622	236,602,622	9,840,001	Satker	999	Tahun 2023 Unaudited
16	Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)	2,504,484		-		-	-	2,504,484	Bagian satker	044	Tahun 2021 Audited
17	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	56,321,763	1,735,814	23,189,146	2,153,332		27,078,292	29,243,471	Satker	035	Triwulan III Tahun 2023
18	Dewan Pengupahan Nasional (DEPENAS)	750,000		744,532			744,532	5,468	Bagian satker	026	Tahun 2022 Unaudited
19	Dewan Pers	44,007,982	2,500,599	22,178,398	338,714		25,017,711	18,990,271	Satker	059	Triwulan III Tahun 2023
20	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)	1,406,397	-	1,404,978			1,404,978	1,419	Bagian satker	010	Tahun 2021 Unaudited

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	Keterangan	BA	Periode Data
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN					
21	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	32,148,490	3,109,746	26,409,078	1,675,725		31,194,549	953,941	Satker	007	Tahun 2023 Unaudited
22	Dewan Riset Nasional (DRN)	4,862,623	-	3,024,685			3,024,685	1,837,938	Bagian satker	042	Tahun 2021 Unaudited
23	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	14,190,765	331,221	12,561,757	552,945		13,445,923	744,842	Satker	033	Tahun 2023 Unaudited
24	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (WANTIKNAS)	3,197,534		2,772,203			2,772,203	425,331	Bagian satker	055	Triwulan III TA 2023
25	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	53,802,468	19,159,009	32,267,441	1,181,059		52,607,509	1,194,959	Bagian satker	048	Tahun 2023 Unaudited
26	Komisi Banding Merek	250,234		249,334			249,334	900	Bagian satker	013	Tahun 2022 Unaudited
27	Komisi Banding Paten	3,559,469	-	3,559,469	-		3,559,469	0	Bagian satker	013	Tahun 2022 Unaudited
28	Komisi Informasi Pusat (KIP)	40,047,604	2,956,754	16,058,027	428,946		19,443,727	20,603,877	Satker	059	Semester I Tahun 2023
29	Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG)	739,700,000		739,700,000			739,700,000	-	Bagian satker	043	Tahun 2021 Unaudited
30	Komisi Kejaksaan Republik Indonesia	15,005,777	2,973,221	11,745,404	287,152	-	15,005,777	-	Bagian satker	034	Tahun 2023 Unaudited
31	Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)	17,026,547	3,309,003	9,168,122	-		12,477,125	4,549,422	Bagian satker	034	Triwulan III TA 2023
32	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)	23,870,673	8,812,611	14,586,131	266,460		23,665,202	205,471	Bagian satker	074	Tahun 2023 Unaudited
33	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	59,853,649	7,351,393	50,079,465	635,780		58,066,638	1,787,011	Satker	059	Tahun 2023 Unaudited
34	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	13,980,132	1,974,978	7,134,829	251,026		9,360,833	4,619,299	Satker	047	Triwulan III TA 2023
35	Komite Akreditasi Nasional (KAN)	38,844,218		34,285,577	473,227		34,758,804	4,085,414	Satker	084	Tahun 2023 Unaudited
36	Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)	17,373,913	-	16,471,487	-	-	16,471,487	902,426	Bagian satker	012	Tahun 2021 Unaudited
37	Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	1,381,152	-	1,380,692			1,380,692	460	Bagian satker	035	Tahun 2023 Unaudited
38	Komite Keuangan Nasional Syariah (KNKS)	22,100,000	-	22,043,055	-	-	22,043,055	56,945	bagian satker	055	Tahun 2021 Unaudited
39	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KKPPIP)	16,532,063		16,484,367	-		16,484,367	47,696	Bagian satker	035	Tahun 2023 Unaudited
40	Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	995,684		995,610			995,610	74	Bagian satker	078	Tahun 2023 Unaudited
41	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	39,176,207	6,542,166	23,865,390	3,403,256	-	33,810,812	5,365,395	Satker	022	Triwulan III TA 2023

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	Keterangan	BA	Periode Data
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN					
42	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	30,925,307	-	-		22,156,615	22,156,615	8,768,692	Bagian satker	092	Tahun 2021 Unaudited
43	Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN)	1,499,090	957,577	505,323	-	-	1,462,900	36,190	Bagian satker	048	Tahun 2023 Unaudited
44	Komite Privatisasi Perusaahaan Perseroan (Persero)						0	0	Tidak aktif	041	Tahun 2021 Unaudited
45	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)	3,867,538		3,726,539	31,979		3,758,518	109,020	Satker	015	Tahun 2023 Unaudited
46	Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)						-	-	Tidak aktif	084	Tahun 2021 Unaudited
47	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	-	-	-	-		-	-	Satker	024	Tahun 2022 Unaudited
48	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	1,535,000		1,533,745		-	1,533,745	1,255	Bagian satker	088	Tahun 2022 Unaudited
49	Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS TN)	1,763,428		1,739,100			1,739,100	24,328	Bagian satker	026	Tahun 2021 Unaudited
50	Lembaga Produktivitas Nasional (LPN)	1,434,447		431,399			431,399	1,003,048	Bagian satker	026	Triwulan III TA 2023
51	Lembaga Sensor Film (LSF)	43,155,897	5,579,463	7,418,581	-		12,998,044	30,157,853	Satker	023	Semester I Tahun 2023
52	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)						0	0	Tidak aktif	024	Tahun 2021 Unaudited
53	Otorita Asahan	-	-	-			0	0	Likuidasi	019	Tahun 2021 Unaudited
54	Sekretariat Pengadilan Pajak	84,186,122	50,214,402	25,779,718	1,898,690		77,892,810	6,293,312	Satker	015	Tahun 2023 Unaudited
55	SKK MIGAS (Satker)	1,719,660,393				1,702,785,595	1,702,785,595	16,874,798	satker	999	Tahun 2023 Unaudited
56	SKK MIGAS (Bukan Satker)	-				-	0	0	Bukan satker	999	Tahun 2023 Unaudited
57	Staf Khusus Presiden dan Utusan Khusus Presiden	19,034,036	-	16,961,578			16,961,578	2,072,458	Bagian satker	114	Tahun 2023 Unaudited
58	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (bukan satker)	-					0	0	Bukan Satker	999	Tahun 2023 Unaudited
59	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (satker)	-	-	119,223		-	119,223	(119,223)	Satker	999	Tahun 2023 Unaudited
60	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII						0	0	Bukan Satker	007	Tahun 2021 Unaudited
61	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (BPODT)	35,706,099	3,917,459	20,955,424	2,051,507		26,924,390	8,781,709	Satker	040	Triwulan III TA 2023
62	Otoritas Nasional Senjata Kimia	-		-			0	0	tidak aktif	019	Tahun 2021 Unaudited
63	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur	36,670,082	6,037,069	25,770,786	2,776,041		34,583,896	2,086,186	satker	040	Tahun 2023 Unaudited
64	Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	-		-	-		0	0	Bagian satker	024	Tahun 2022 Unaudited
65	Komite Nasional Disabilitas	8,442,294	3,985,361	3,295,296			7,280,657	1,161,637			Triwulan III TA 2023
66	Komite Cipta Kerja	21,200,000,000				18,258,534,947	18,258,534,947	2,941,465,053	satker	999	Tahun 2021 Unaudited

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	Keterangan	BA	Periode Data
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN					
67	Komite Penanganan Covid 19 dan PEN	-	-	-			-	-	Bagian satker	036	Semester I Tahun 2023
68	Tim Pengembangan Vaksin COVID-19	32,906,825	2,479,531	21,394,830	3,652,539	0	27,526,900	5,379,925	bagian satker	024	Tahun 2021 Unaudited
69	Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN)	704,209	0	689,947	0	0	689,947	14,262	bagian satker		Tahun 2022 Unaudited
70	Kantor Staf Presiden	120,704,012	53,705,627	52,668,598	12,621,053		118,995,278	1,708,734	bagian satker		Tahun 2023 Unaudited
	J U M L A H	**25,576,331,318**	**267,961,913**	**1,646,842,832**	**44,094,195**	**20,224,282,929**	**22,183,181,869**	**3,393,149,449**			

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS
(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	ASET LANCAR	INVESTASI	ASET TETAP	ASET LAINNYA	TOTAL ASET	KEWAJIBAN JK PENDEK	KEWAJIBAN JK PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	TOTAL EKUITAS	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS DANA
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11	12=(10+11)
1	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	442,558,255	-	32,015,411	-	474,573,666	91,891,853	9,720,663	101,612,516	372,961,150	474,573,666
2	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL)	185,943,984	-	20,180,199,695	1,169,543,740	21,535,687,419	50,190,618	-	50,190,618	21,485,496,801	21,535,687,419
3	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	1,835,591		42,587,292	-	44,422,883	664,764	-	664,764	43,758,119	44,422,883
4	Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda					-			-	-	-
5	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM)	300,000	-	1,723,000	-	2,023,000	551,000	-	551,000	1,472,000	2,023,000
6	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	762,882,721	-	310,756,910	6,266,201	1,079,905,832	149,174,588		149,174,588	930,731,244	1,079,905,832
7	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	57,293,622,092	161,533,228,995	1,675,968,979	-	220,502,820,066	53,583,885,312	146,255,739,610	199,839,624,922	20,663,195,144	220,502,820,066
8	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)	300,000		726,012	332,058	1,358,070	1,502,807		1,502,807	(144,737)	1,358,070
9	Badan Restorasi Gambut	3,883,890		12,433,381	93,067	16,410,338	8,078,208	-	8,078,208	8,332,130	16,410,338
10	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	10,838,260	146,866	313,972	754,182,430	765,481,528	-	738,918,954	738,918,954	26,562,574	765,481,528
11	Dewan Energi Nasional (DEN)	2,182,875		2,735,762	-	4,918,637	1,751,737		1,751,737	3,166,900	4,918,637
12	Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)	479,052		538,740	-	1,017,792	328,159		328,159	689,633	1,017,792
13	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun Kepulauan Riau	-	-	1,032,471,942	14,149,043	1,046,620,985	-	-	-	1,046,620,985	1,046,620,985
14	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	797,212		2,417,177	2,400	3,216,789	2,366,267		2,366,267	850,522	3,216,789
15	Dewan Pers	2,470,733		1,042,894	543,707	4,057,334	2,700,616		2,700,616	1,356,718	4,057,334
16	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	699,238	-	3,036,664	366,657	4,102,559	347,956	-	347,956	3,754,603	4,102,559
17	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	-	-	1,513,309	-	1,513,309	-	-	-	1,513,309	1,513,309
18	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	337,422		47,443,279	328,988	48,109,689	331,804		331,804	47,777,885	48,109,689
19	Komisi Informasi Pusat (KIP)	2,051,980	-	1,734,463	-	3,786,443	3,146,088		3,146,088	640,355	3,786,443
20	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	280,411	-	2,413,294	197,099	2,890,804	-		-	2,890,804	2,890,804
21	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	26,133		2,020,949	75,000	2,122,082	1,240,993	-	1,240,993	881,089	2,122,082
22	Komite Keuangan Nasional Syariah (KNKS)	-	-	-	-	-	-		-	-	-
23	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	458,046	-	5,915,532	14,107,893	20,481,471	1,099,799		1,099,799	19,381,672	20,481,471
24	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)	32,032		59,208	-	91,240	671	-	671	90,569	91,240
25	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	-		-	-	-	-		-	-	-
26	Lembaga Sensor Film (LSF)	122,495	-	2,226,223	865,754	3,214,472	-		-	3,214,472	3,214,472
27	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)					-	-		-	-	-
28	Otorita Asahan	2,471,153		4,615,662	-	7,086,815	234,422		234,422	6,852,393	7,086,815

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	ASET LANCAR	INVESTASI	ASET TETAP	ASET LAINNYA	TOTAL ASET	KEWAJIBAN JK PENDEK	KEWAJIBAN JK PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	TOTAL EKUITAS	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS DANA
29	Sekretariat Pengadilan Pajak	903,856	-	15,162,093	1,056,084	17,122,033	1,163,151	-	1,163,151	15,958,882	17,122,033
30	SKK MIGAS (Satker)	24,246,334		70,960,236	51,040,362,321	51,135,568,891	30,010,238	51,000,911,331	51,030,921,569	104,647,322	51,135,568,891
31	MIGAS (Bukan Satker)	59,732,119		37,387,854	57,860,700	154,980,673	241,559,859	1,499,626,605	1,741,186,464	(1,586,205,791)	154,980,673
32	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (bukan satker)	8,359,822,880		2,594,889,321	1,026,353,108	11,981,065,309	215,258,091	3,280,681,106	3,495,939,197	8,485,126,112	11,981,065,309
33	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (satker)	-		117,480	-	117,480		-	-	117,480	117,480
34	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII	15,079,345	-	106,256,551	4,919,767	126,255,663	47,577,940	10,308,850	57,886,790	68,368,873	126,255,663
35	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	1,115,593		3,166,908		4,282,501	13,075	-	13,075	4,269,426	4,282,501
36	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba	4,460,255		442,230,596	460,261	447,151,112	1,118,871	-	1,118,871	446,032,241	447,151,112
37	Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI)	-		-	-	-	-	-	-	-	-
38	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur	1,224,827	-	87,842,678	678,229	89,745,734	603,666		603,666	89,142,068	89,745,734
39	Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS TN)	1,763,428	-	-	-	1,763,428	-	-	-	1,763,428	1,763,428
40	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)	1,652,854				1,652,854	-	-	-	1,652,854	1,652,854
41	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	-		141,772,022		141,772,022	-	-	-	141,772,022	141,772,022
42	DPN Korpri	3,486,166	-	183,856	-	3,670,022	74,148	-	74,148	3,595,874	3,670,022
43	Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)	-	-	-		-	-	-	-	-	-
44	Tim Pengembangan Vaksin Covid	85,785	-	95,111,704	47,135	95,244,624	-	-	-	95,244,624	95,244,624
45	Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	-	-	-		-	-	-	-	-	-
46	Komite Penanganan Covid 19 dan PEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Komite Cipta Kerja	656,326	-	-	1,088,970,650	1,089,626,976	-	-	-	1,089,626,976	1,089,626,976
48	Komite TPPU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Kantor Satf Presiden	463,540		9,387,583	246,850	10,097,973	7,530,712	-	7,530,712	2,567,261	10,097,973
TOTAL		**67,189,266,883**	**161,533,375,861**	**26,971,378,632**	**55,182,009,142**	**310,876,030,518**	**54,444,397,413**	**202,795,907,119**	**257,240,304,532**	**53,635,725,986**	**310,876,030,518**

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NO	BUMN	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
		2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	8 = (6-7)	9	11	12=10+11	13	14	
1	Perum Perhutani	4,776,816	4,921,086	(144,271)	958,447	99,673	51,955	662,549	501,926	(178,421)	323,505	501,473	323,052
2	Perum Bulog	46,067,259	44,243,761	1,823,498	821,070	177,502	1,353,642	1,113,425	820,189	(14,239)	805,949	856,334	842,116
3	Perum Jasa Tirta I	584,578	498,357	86,222	21,986	17,825	430	89,953	68,667	(307)	68,360	68,897	68,590
4	Perum Jasa Tirta II	1,080,171	921,079	159,092	48,572	29,156	4,855	173,653	138,017	(10,902)	127,115	138,793	127,891
5	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	177,597	187,780	(10,183)	5,836	3,206	39,856	(47,409)	(47,409)	-	(47,409)	(47,409)	(47,409)
6	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	4,441,190	3,842,858	598,332	98,630	45,759	55,725	595,479	428,413	(11,195)	417,218	424,711	417,113
7	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	476,981	433,021	43,960	2,901	7,924	2,698	36,240	22,773	14,941	37,714	22,710	37,714
8	Perum Perumnas	1,363,516	1,281,055	82,461	184,928	-	363,013	(95,625)	(95,967)	76,533	(19,434)	(100,968)	(24,435)
9	Perum Damri	1,529,152	1,474,807	54,345	28,105	39,220	16,777	26,453	29,821	(25,384)	4,437	29,821	4,437
10	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	3,123,396	2,702,205	421,191	100,379	40,865	-	480,706	378,166	(6,111)	372,055	378,166	372,055
	Total Perum	**63,620,657**	**60,506,009**	**3,114,647**	**2,270,854**	**461,128**	**1,888,950**	**3,035,422**	**2,244,595**	**(155,085)**	**2,089,509**	**2,272,528**	**2,121,123**
1	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	15,237,990	14,947,452	290,538	1,207,980	586,094	626,575	285,849	233,858	(51,056)	182,801	151,473	(100,923)
2	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	51,123,869	45,801,155	5,322,715	3,604,640	1,891,716	3,962,712	3,072,926	1,670,263	1,098,778	2,769,041	1,712,950	2,721,823
3	PT Pupuk Indonesia (Persero)	79,207,267	69,610,643	9,596,624	1,530,270	-	2,519,821	8,607,074	6,253,560	(377,799)	5,875,761	6,200,780	5,822,981
4	PT Bio Farma (Persero)	15,587,531	16,491,447	(903,916)	69,743	884,085	694,322	(2,412,580)	(2,103,751)	(2,865)	(2,106,616)	(2,256,708)	(1,968,198)
5	PT Pertamina (Persero)	1,156,067,284	1,027,958,472	128,108,812	23,073,078	16,613,131	22,060,411	112,508,348	72,761,488	(6,190,210)	66,571,278	67,749,787	62,257,035
6	PT Pos Indonesia (Persero)	5,479,121	4,861,644	617,477	672,289	326,226	261,649	701,892	728,215	457,278	1,185,492	748,699	1,205,989
7	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	487,384,064	440,183,990	47,200,074	6,190,205	-	21,010,355	32,379,924	22,071,458	4,297,375	26,368,833	22,025,595	26,322,970
8	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	38,651,360	34,338,989	4,312,372	381,620	-	1,390,231	3,303,761	2,295,601	(29,546)	2,266,055	2,170,497	2,168,662
9	PT Semen Kupang (Persero)	33,750	55,777	(22,028)	9	-	903	(22,921)	(22,921)	-	(22,921)	(22,921)	(22,921)
10	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	149,220,553	103,747,153	45,473,399	2,756,310	2,781,645	4,652,413	40,795,651	32,207,516	(1,453,309)	30,754,207	24,559,749	23,083,155
11	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	78,751	90,285	(11,534)	514	25	3,733	(14,778)	(14,778)	-	(14,778)	(14,778)	(14,778)
12	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	396,274	451,250	(54,977)	59,553	37,738	8,017	(41,179)	(41,424)	-	(41,424)	(41,424)	(41,424)
13	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	21,692	29,345	(7,653)	8,368	(171)	600	285	241	-	241	241	241
14	PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	107,873,640	99,702,687	8,170,953	28,367,153	-	5,898,410	30,639,696	27,523,394	(1,661,903)	25,861,491	24,336,658	22,962,456
15	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	23,254,876	23,209,724	45,152	642,361	43,184	1,952,970	(1,308,641)	(1,751,159)	236,193	(1,514,966)	(1,800,384)	(1,564,191)
16	PT Boma Bisma Indra (Persero)	189,762	183,051	6,712	18,744	15,025	7,378	3,053	3,053	-	3,053	3,053	3,053
17	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	503,679	549,996	(46,316)	8,831	1,286	49,772	(88,544)	(89,572)	1,425	(88,147)	(89,408)	(87,983)
18	PT Barata Indonesia (Persero)	179,901	221,889	(41,988)	10,528	3,441	12,765	(47,666)	(47,666)	-	(47,666)	(47,666)	(47,666)
19	PT LEN Industri (Persero)	25,219,923	23,163,650	2,056,272	624,155	929,698	857,594	893,136	726,202	1,209,190	1,935,393	709,994	1,886,688
20	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	20,072,993	18,628,869	1,444,125	567,441	365,454	809,086	837,025	289,883	8,623	298,506	214,016	222,639
21	PT Amarta Karya (Persero)	116,828	176,838	(60,010)	135,113	120,069	4,588	(49,554)	(53,226)	-	(53,226)	(53,226)	(53,226)
22	PT Brantas Abipraya (Persero)	4,864,992	4,763,093	101,899	492,095	109,839	174,409	309,746	201,901	88,545	290,446	200,486	289,025

NO	BUMN	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
23	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	21,318,605	14,349,917	6,968,688	5,659,731	1,093,447	3,592,352	7,942,620	6,831,929	(93,016)	6,738,913	6,793,551	6,619,792
24	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	10,954,693	12,311,182	(1,356,488)	4,937,250	2,755,526	4,419,903	(3,594,668)	(4,018,265)	(47,227)	(4,065,492)	(3,770,396)	(3,817,521)
25	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	22,530,356	21,652,478	877,878	697,835	5,634,591	3,206,109	(7,264,987)	(7,824,539)	(74,396)	(7,898,935)	(7,128,264)	(7,196,040)
26	PT Hutama Karya (Persero)	26,926,321	27,340,044	(413,723)	4,775,648	178,007	2,039,715	2,144,203	1,872,556	86,283	1,958,839	1,827,891	1,914,174
27	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	18,464,215	17,406,438	1,057,778	1,193,812	895,757	1,206,629	149,204	127,090	85,159	212,249	481,379	568,489
28	PT Industri Kereta Api (Persero)	2,683,204	2,330,834	352,370	36,309	22,581	296,456	69,643	36,037	1,099	37,135	28,752	29,755
29	PT PDI Pulau Batam (Persero)	77,426	73,500	3,926	4,237	2,814	612	4,736	4,736	-	4,736	4,736	4,736
30	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	33,916,007	26,167,653	7,748,355	736,600	501,700	2,860,120	5,123,136	4,012,581	1,401,141	5,413,722	3,822,122	5,223,263
31	PT Indah Karya (Persero)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	PT Virama Karya (Persero)	546,015	492,188	53,827	15,019	22,149	11,085	35,612	21,084	9,303	30,387	21,084	30,387
33	PT Yodya Karya (Persero)	364,563	339,915	24,648	165,504	25,458	2,120	162,573	158,751	90,303	249,055	158,751	249,055
34	PT Indra Karya (Persero)	210,386	198,305	12,081	15,428	8,090	1,135	18,284	13,271	1,482	14,753	13,271	14,753
35	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	61,471,696	53,167,461	8,304,235	26,665,503	9,330,000	-	25,639,738	21,106,228	673,295	21,779,523	20,909,476	21,559,964
36	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	186,914,303	113,316,225	73,598,078	43,318	(1,043,485)	-	74,684,881	60,051,870	906,089	60,957,959	55,060,057	55,916,730
37	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	196,057,735	58,393,212	137,664,523	45,967,779	107,202,590	-	76,429,712	60,425,048	628,611	61,053,659	60,099,863	60,708,390
38	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	32,754,250	28,016,316	4,737,934	7,554	365,278	-	4,380,209	3,500,988	347,734	3,848,721	3,500,988	3,848,721
39	PT ASABRI (Persero)	7,297,369	6,836,324	461,045	97,792	-	499	558,339	483,988	26,136	510,124	483,988	510,124
40	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	54,001	256,287	(202,286)	-	-	-	(202,286)	(188,834)	(634,170)	(823,004)	(188,834)	(823,004)
41	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	3,389,675	3,275,844	113,830	53,385	95,467	63,000	8,748	56,040	66,461	122,501	56,040	122,501
42	PT Taspen (Persero)	16,898,246	21,658,531	(4,760,285)	5,896,233	1,456	-	1,134,492	804,768	790,687	1,595,455	808,216	1,598,899
43	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	44,795,371	40,068,772	4,726,599	6,137,636	318,049	6,967,762	3,578,423	3,843,956	5,726	3,849,682	3,814,213	3,823,287
44	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	5,766,619	5,647,503	119,116	179,405	-	-	298,521	201,631	(63,772)	137,859	201,202	137,428
45	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	30,898,518	27,141,285	3,757,234	151,574	152,865	1,170,684	2,585,259	1,993,071	711,264	2,704,335	1,996,264	2,707,528
46	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	27,632,437	21,991,616	5,640,821	6,500,399	9,570,761	397,083	2,173,376	1,742,301	517,148	2,259,449	1,670,999	2,188,006
47	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	5,913,103	5,203,542	709,562	368,748	41,160	-	1,037,150	783,558	(32,197)	751,361	737,839	706,840
48	PT Danareksa (Persero)	11,239,908	9,965,066	1,274,842	683,454	426,632	-	1,531,664	1,142,234	2,786,953	3,929,186	817,539	3,449,269
49	PT PANN (Persero)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	4,924,834	4,279,288	645,546	267,460	70,213	139,540	703,254	636,540	(8,419)	628,121	613,449	604,912
51	PT Djakarta Lloyd (Persero)	254,826	227,770	27,057	15,661	1,068	9,982	31,668	29,628	-	29,628	29,628	29,628
52	PT Primissima (Persero)	1,077	3,358	(2,281)	328	640	286	(2,880)	(2,880)	-	(2,880)	(2,880)	(2,880)
53	PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	23,347,201	18,176,586	5,170,615	603,840	662,874	3,355,180	1,756,401	1,101,015	(209,104)	891,911	1,203,081	996,989
54	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	133,834	138,454	(4,619)	6,854	209	58	1,968	1,968	-	1,968	1,968	1,968

NO	BUMN	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
55	PT Industri Sandang Nusantara (Persero) (dalam likuidasi)	-	-		-	-	-			-		-	-
56	PT Produksi Film Negara (Persero)	2,690	3,184	(493)	1,087	-	72	523	260	(40)	221	260	221
57	PT Iglas (Persero) (dalam likuidasi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	PT Kertas Kraft Aceh (Persero) (dalam likuidasi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	PT Kertas Leces (Persero) (dalam pailit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) (dalam pailit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Persero	**2,978,505,585**	**2,469,596,475**	**508,909,110**	**182,306,386**	**163,044,385**	**96,699,094**	**431,472,018**	**321,790,742**	**5,603,253**	**327,393,995**	**300,523,696**	**306,771,770**
	TOTAL	**3,042,126,242**	**2,530,102,484**	**512,023,758**	**184,577,241**	**163,505,513**	**98,588,044**	**434,507,441**	**324,035,337**	**5,448,168**	**329,483,505**	**302,796,224**	**308,892,893**

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN) NERACA PER 31 DESEMBER 2023

NO	BUMN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	EKUITAS LAIN	SALDO LABA (RUGI)	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	KEPEMILIKAN NEGARA
1	Perum Perhutani	2.106.655	15.859.801	17.966.455	1.653.902	4.168.223	5.822.125	2.586.303	(1.334.148)	-	10.899.567	12.151.722	(7.392)	12.144.330	12.151.722
2	Perum Bulog	33.844.822	7.392.663	41.237.485	30.786.151	766.473	31.552.625	12.522.387	-	(124.130)	(2.518.060)	9.880.196	(195.336)	9.684.860	9.880.196
3	Perum Jasa Tirta I	744.993	468.451	1.213.444	210.322	8.635	218.957	31.701	4.186	7.681	949.433	993.001	1.486	994.487	993.001
4	Perum Jasa Tirta II	1.066.587	997.679	2.064.266	250.761	303.663	554.424	164.548	-	(190.253)	1.528.805	1.503.100	6.742	1.509.841	1.503.100
5	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	76.242	918.473	994.714	675.737	260.694	936.431	43.749	-	801.851	(787.317)	58.283	-	58.283	58.283
6	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	3.072.813	3.478.865	6.551.679	1.331.442	1.024.097	2.355.539	363.573	(64.059)	(200.755)	4.070.727	4.169.486	26.653	4.196.140	4.169.486
7	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	214.827	217.960	432.788	61.499	109.828	171.327	9.116	47.605	-	204.009	260.730	731	261.461	260.730
8	Perum Perumnas	7.110.697	1.180.732	8.291.429	2.849.604	4.012.459	6.862.063	3.529.375	55.036	289.349	(2.451.500)	1.422.261	7.105	1.429.366	1.422.261
9	Perum Damri	288.237	2.043.620	2.331.857	376.898	687.867	1.064.764	1.873.881	19.592	95.523	(721.904)	1.267.093	-	1.267.093	1.267.093
10	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	4.056.319	2.961.949	7.018.268	792.854	126.530	919.384	3.997.243	(516.195)	(32.774)	2.650.610	6.098.884	-	6.098.884	6.098.884
	Total Perum			**88.102.384**			**50.457.639**	**25.121.877**	**(1.787.983)**	**646.492**	**13.824.370**	**37.804.756**	**(160.011)**	**37.644.745**	**37.804.756**
1	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	8.445.197	20.645.429	29.090.626	9.498.777	3.717.147	13.215.924	12.898.183	267.726	2.963.636	(452.742)	15.676.802	197.899	15.874.702	15.676.802
2	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	24.761.251	122.822.560	147.583.811	22.064.620	53.051.894	75.116.514	40.216.132	-	32.315.404	(5.170.546)	67.360.990	5.106.307	72.467.296	67.360.990
3	PT Pupuk Indonesia (Persero)	58.439.356	84.556.974	142.996.330	30.278.416	20.752.736	51.031.152	25.000.000	-	29.908.402	36.975.442	91.883.844	81.333	91.965.178	91.883.844
4	PT Bio Farma (Persero)	13.647.250	19.609.330	33.256.579	11.879.427	3.195.845	15.075.271	17.482.528	(6.390.845)	2.499.760	1.433.754	15.025.197	3.156.111	18.181.308	15.025.197
5	PT Pertamina (Persero)	593.385.166	813.472.218	1.406.857.384	290.290.562	476.949.184	767.239.746	255.554.727	(15.861.658)	(852.850)	348.750.429	587.590.647	52.026.991	639.617.638	587.590.647
6	PT Pos Indonesia (Persero)	5.372.709	8.286.130	13.658.839	3.905.452	1.618.322	5.523.774	455.023	2.344	3.702.781	4.019.945	8.180.093	(45.028)	8.135.065	8.180.093
7	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	131.383.486	1.539.256.218	1.670.639.704	143.195.432	511.812.873	655.008.305	150.536.096	34.608	679.581.924	184.341.379	1.014.494.007	1.137.392	1.015.631.399	1.014.494.007
8	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	19.782.972	62.037.556	81.820.529	16.111.663	17.907.890	34.019.553	675.154	6.217.240	1.583.419	34.785.676	43.261.489	4.539.486	47.800.975	22.149.883
9	PT Semen Kupang (Persero)	6.097	121.271	127.367	109.447	534.091	643.538	133.713	-	5.301	(655.184)	(516.171)	-	(516.171)	-
10	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	55.613.000	231.429.000	287.042.000	71.568.000	58.912.000	130.480.000	4.953.111	2.711.000	9.639.000	118.441.000	135.744.111	20.817.889	156.562.000	70.709.107
11	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	92.425	842.691	935.116	130.578	352.990	483.568	456.694	3.656	420.951	(429.754)	451.548	-	451.548	451.548
12	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	263.741	1.800.427	2.064.167	3.391.961	322.993	3.714.954	976.600	635	-	(2.628.021)	(1.650.787)	-	(1.650.787)	-

NO	BUMN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	EKUITAS LAIN	SALDO LABA (RUGI)	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	KEPEMILIKAN NEGARA
13	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	43.516	237.441	280.957	612.689	475.846	1.088.534	240.936	50	136.990	(1.185.553)	(807.577)	-	(807.577)	-
14	PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	67.088.495	192.093.398	259.181.893	49.439.429	80.111.678	129.551.107	119.090.865	(69.543.526)	10.070.749	51.807.269	111.425.357	18.205.429	129.630.786	111.425.357
15	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	11.164.420	33.438.867	44.603.286	32.843.431	4.029.162	36.872.593	15.247.140	2.643.774	22.989.937	(33.345.970)	7.534.880	195.813	7.730.693	6.027.904
16	PT Boma Bisma Indra (Persero)	359.882	551.321	911.203	689.260	153.667	842.927	340.916	22.808	450.816	(743.756)	70.785	(2.509)	68.276	70.785
17	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	364.086	903.894	1.267.980	827.706	1.153.923	1.981.629	350.000	1.229	744.870	(1.804.693)	(708.594)	(5.056)	(713.649)	-
18	PT Barata Indonesia (Persero)	1.968.138	1.350.248	3.318.385	2.837.862	2.111.589	4.949.451	762.915	3.221	599.768	(2.996.970)	(1.631.066)	-	(1.631.066)	-
19	PT LEN Industri (Persero)	38.843.711	16.573.951	55.417.662	28.904.550	10.585.130	39.489.680	13.054.563	-	1.822.546	746.587	15.623.696	304.286	15.927.982	15.623.696
20	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	28.580.551	11.911.480	40.492.031	24.981.176	6.292.062	31.273.238	840.761	4.755.656	681.734	2.337.428	8.615.579	603.213	9.218.792	5.542.402
21	PT Amarta Karya (Persero)	535.402	268.557	803.959	181.816	473.552	655.368	44.285	-	288.399	(184.093)	148.591	-	148.591	148.591
22	PT Brantas Abipraya (Persero)	5.149.183	4.129.489	9.278.672	5.028.743	2.105.059	7.133.802	161.555	-	482.873	1.469.568	2.113.996	30.874	2.144.870	2.113.996
23	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	7.974.775	121.337.214	129.311.989	22.821.164	67.579.619	90.400.783	3.628.936	3.946.021	(2.352.480)	22.668.960	27.891.437	11.019.769	38.911.206	19.524.006
24	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	22.721.935	72.873.962	95.595.897	22.838.442	61.155.944	83.994.386	2.880.681	13.565.914	820.272	(11.985.083)	5.281.783	6.319.728	11.601.512	3.979.771
25	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	30.801.656	35.179.580	65.981.236	38.437.294	17.972.329	56.409.623	896.995	6.555.499	5.162.520	(6.865.136)	5.749.878	3.821.735	9.571.613	3.740.296
26	PT Hutama Karya (Persero)	49.614.334	120.125.152	169.739.486	21.820.021	31.294.953	53.114.974	113.042.000	44.037	740.784	1.887.341	115.714.162	910.350	116.624.512	115.714.162
27	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	31.291.249	25.233.794	56.525.043	26.992.212	14.389.440	41.381.651	619.990	4.710.055	2.248.887	4.143.327	11.722.258	3.421.133	15.143.391	5.978.352
28	PT Industri Kereta Api (Persero)	3.080.197	1.931.453	5.011.651	3.901.450	926.923	4.828.373	1.251.843	-	754.376	(1.858.736)	147.483	35.795	183.278	147.483
29	PT PDI Pulau Batam (Persero)	79.543	66.119	145.661	27.149	77.905	105.053	19.000	-	(419)	22.027	40.608	-	40.608	40.608
30	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	20.319.101	98.021.965	118.341.066	18.173.954	53.325.897	71.499.851	40.575.584	(33.358.048)	(1.507.821)	39.261.038	44.970.752	1.870.463	46.841.215	44.970.752
31	PT Indah Karya (Persero)	566.138	301.331	867.469	522.470	349.199	871.669	7.000	-	99.939	(111.139)	(4.200)	-	(4.200)	-
32	PT Virama Karya (Persero)	350.854	153.012	503.866	150.852	56.008	206.860	25.000	1.051	85.927	185.028	297.006	-	297.006	297.006
33	PT Yodya Karya (Persero)	414.933	319.955	734.889	223.240	16.696	239.935	50.000	-	82.425	362.529	494.953	-	494.953	494.953
34	PT Indra Karya (Persero)	178.626	177.692	356.319	114.701	65.655	180.356	10.001	-	105.968	59.994	175.962	-	175.962	175.962
35	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			1.086.663.986			931.931.466	9.054.807	17.010.254	16.830.439	107.235.514	150.131.014	4.601.506	154.732.520	90.078.608
36	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			2.174.219.449			1.886.724.487	11.666.667	17.643.264	34.239.096	197.303.758	260.852.784	26.642.178	287.494.962	135.643.448
37	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			1.965.007.030			1.648.534.888	7.577.950	75.853.127	14.221.057	213.711.422	311.363.556	5.108.586	316.472.142	165.614.275
38	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			438.749.736			408.270.584	7.017.222	4.418.899	2.204.088	16.838.943	30.479.152	-	30.479.152	18.287.491
39	PT ASABRI (Persero)			46.942.727			48.012.044	200.000	-	(2.814.498)	1.545.181	(1.069.317)	-	(1.069.317)	-
40	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)			5.409.085			5.679.428	235.000	26.546.256	2.673.742	(29.725.341)	(270.343)	-	(270.343)	-
41	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)			14.206.716			11.500.999	878.358	840.674	312.358	674.308	2.705.698	19	2.705.718	2.705.698
42	PT Taspen (Persero)			376.985.972			364.360.933	500.000	-	(4.192.795)	16.226.184	12.533.390	91.649	12.625.039	12.533.390
43	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	10.093.600	93.774.512	103.868.112	17.988.837	105.683.300	123.672.137	32.905.976	467.481	268.507	(52.900.253)	(19.258.289)	(545.736)	(19.804.025)	-
44	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	5.062.044	2.973.988	8.036.032	1.012.238	200.053	1.212.292	7.629.900	398.022	1.245.072	(2.453.138)	6.819.857	3.884	6.823.741	6.819.857
45	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	12.769.699	64.553.791	77.323.489	13.986.008	31.553.410	45.539.419	22.368.743	(24.070)	(324.765)	9.675.350	31.695.259	88.812	31.784.071	31.695.259

NO	BUMN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	EKUITAS LAIN	SALDO LABA (RUGI)	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	KEPEMILIKAN NEGARA
46	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)			137.043.592			95.500.347	90.163.537	(59.815.120)	898.144	9.398.543	40.645.104	898.141	41.543.245	40.645.104
47	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	5.374.903	3.326.263	8.701.167	1.221.149	744.742	1.965.891	7.012.393	(2.630.821)	153.215	1.830.336	6.365.123	370.153	6.735.276	6.365.123
48	PT Danareksa (Persero)	16.115.033	45.631.869	61.746.902	11.589.272	10.027.793	21.617.065	18.332.900	5.482.610	4.451.850	366.051	28.633.411	11.496.426	40.129.838	28.633.411
49	PT PANN (Persero)			1.019.802			6.827.745	45.997	192.066	(486)	(6.045.520)	(5.807.943)	-	(5.807.943)	-
50	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	1.949.764	9.105.937	11.055.701	1.213.186	1.457.803	2.670.989	5.173.195	397.010	-	2.640.240	8.210.445	174.267	8.384.712	8.210.445
51	PT Djakarta Lloyd (Persero)	146.709	645.106	791.814	388.041	232.657	620.699	1.955.421	47	(0)	(1.784.353)	171.116	-	171.116	134.582
52	PT Primissima (Persero)	14.700	143.489	158.189	157.420	18.545	175.965	13.000	2.276	-	(33.052)	(17.776)	-	(17.776)	-
53	PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	15.348.003	83.931.337	99.279.340	12.092.348	53.741.915	65.834.263	76.843.739	(43.468.605)	(381.109)	254.257	33.248.282	196.795	33.445.077	33.248.282
54	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	30.311	253.287	283.599	169.640	3.206	172.846	11.000	205,95625	223.081	(123.535)	110.752	-	110.752	110.752
55	PT Industri Sandang Nusantara (Persero) (dalam likuidasi)	61.256	422.840	484.096	329.545	107.446	436.991	198.870	-	-	(151.765)	47.105	-	47.105	47.105
56	PT Produksi Film Negara (Persero)	3.807	30.366	34.173	17.973	16.617	34.589	54.904	-	-	(55.320)	(416)	-	(416)	-
57	PT Iglas (Persero) (dalam likuidasi)	594	11.763	12.358	1.391.271	-	1.391.271	47.007	94.583	-	(1.520.503)	(1.378.913)	-	(1.378.913)	-
58	PT Kertas Kraft Aceh (Persero) (dalam likuidasi)	33.039	919.640	952.679	1.999.652	191.490	2.191.141	798.994			(2.037.456)	(1.238.462)	-	(1.238.462)	-
59	PT Kertas Leces (Persero) (dalam pailit)	26.791	567.027	593.818	591.048	725.419	1.316.467	417.049	-	618.400	(1.758.098)	(722.649)	-	(722.649)	-
60	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) (dalam pailit)	48.517	421.571	470.088	166.233	2.224.562	2.390.796	1.964.556	2	4.409.118	(8.294.501)	(1.920.826)	119	(1.920.707)	-
	Total Persero			**11.500.180.246**			**8.095.711.952**	**1.108.516.505**	**(19.224.074)**	**877.214.754**	**1.255.179.720**	**3.221.686.905**	**182.781.389**	**3.404.468.294**	**2.810.311.032**
	TOTAL			**11.588.282.630**	**-**	**-**	**8.146.169.591**	**1.133.638.382**	**(21.012.056)**	**877.861.246**	**1.269.004.089**	**3.259.491.661**	**182.621.378**	**3.442.113.039**	**2.848.115.788**

NILAI BPYBDS PADA PERSERO/PERUM

NO	BUMN	Nilai BPYBDS per 31 Desember 2022	Telah Ditetapkan Menjadi PMN s.d. 30 September 2023	Pengurangan s.d. September 2023	Nilai BPYBDS Per 30 September 2023	Selisih	Keterangan
		(Rp)		(Rp)	(Rp)		
1	PT Pertamina	12,452,878,178.53	0.00	-	12,452,878,178.53		1. Rincian aset BPYBDS tersebut adalah sebagai berikut: a. DPPU Bandara Hasanudin Makassar Tahap II - Instalasi Refueling Apron senilai Rp3.042.863.450,00. b. Fasilitas DPPU Bandara Juanda Surabaya- Fuel Hydrant Facilities senilai Rp9.410.014.728,53. 2. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan dengan alternatif penyelesaian melalui skema PMPP.
Jumlah		**12,452,878,178.53**	**-**	**-**	**12,452,878,178.53**	**-**	

Penyertaan Modal Pemerintah Pada Non BUMN (Minoritas) Tahun 2023

No.	Nama Perusahaan	% Saham Kepemilikan RI	Jumlah Saham	Kepemilikan Pemerintah
1	PT Perkebunan Nusantara I	10.58%	946,239	946,239,000,000
2	PT Perkebunan Nusantara IV	7.07%	593,847	593,847,000,000
3	PT Asean Bintulu Fertilizer	13.00%	39,000	125,307,000,000
4	PT Istaka Karya (Persero) (dalam pailit)	7.66%	50,000	50,000,000,000
5	PT Rekayasa Industri	4.97%	22,366	22,366,000,000
6	PT Indosat, Tbk	0.00%	1	100
7	PT PANN Pembiayaan Maritim	0.00%	1	1,000,000
8	PT Bukit Asam Tbk	0.00%	5	500
9	PT Timah Tbk	0.00%	1	50
10	PT Aneka Tambang Tbk	0.00%	1	100
11	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	0.00%	1	100
12	PT Indofarma Tbk	0.00%	1	100
13	PT Kimia Farma Tbk	0.00%	1	100
14	PT Asuransi Jasa Indonesia	0.00%	1	1,000,000
15	PT Jasa Raharja	0.00%	1	1,000,000
16	PT Jaminan Kredit Indonesia	0.00%	1	1,000,000
17	PT Asuransi Kredit Indonesia	0.00%	1	1,000,000
18	PT Energy Management Indonesia	0.00%	1	1,000,000
19	PT Pegadaian	0.00%	1	1,000,000
20	PT Permodalan Nasional Madani	0.00%	1	1,000,000
21	PT Hotel Indonesia Natour	0.00%	1	1,000,000
22	PT Sarinah	0.00%	1	1,000,000
23	PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko	0.00%	1	1,000,000
24	PT Angkasa Pura I	0.00%	1	1,000,000
25	PT Angkasa Pura II	0.00%	1	1,000,000
26	PT Sucofindo	0.00%	1	1,000,000
27	PT Surveyor Indonesia	0.00%	1	1,000,000
28	PT Perikanan Indonesia	0.00%	1	1,000,000
29	PT Berdikari	0.00%	1	1,000,000
30	PT Sang Hyang Seri	0.00%	1	1,000,000
31	PT Garam	0.00%	1	1,000,000
32	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	0.00%	1	1,000,000
33	PT Nindya Karya	0.00%	1	1,000,000
34	PT Kawasan Berikat Nusantara	0.00%	1	1,000,000
35	PT Kawasan Industri Wijayakusuma	0.00%	1	1,000,000
36	PT Kawasan Industri Medan	0.00%	1	1,000,000
37	PT Kawasan Industri Makassar	0.00%	1	1,000,000
38	PT Balai Pustaka	0.01%	1	1,000,000
39	PT Kliring Berjangka Indonesia	0.00%	1	1,000,000
40	PT Perusahaan Pengelola Aset	0.00%	1	1,000,000
41	PT Dahana	0.00%	1	1,000,000
42	PT Pindad	0.00%	1	1,000,000
43	PT Dirgantara Indonesia	0.00%	1	1,000,000
44	PT PAL Indonesia	0.00%	1	1,000,000
45	PT Industri Nuklir Indonesia	0.00%	1	1,000,000
46	PT Semen Baturaja Tbk	0.00%	1	100
47	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	0.00%	1	500
48	PT Indonesia Asahan Aluminium	0.00%	1	415,000
49	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia	0.00%	1	1,000,000
			Total	**1,737,793,416,650**

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN NON-BUMN (MINORITAS)
LAPORAN LABA RUGI

NO	PERUSAHAAN MINORITAS	KODE	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
1	PT Perkebunan Nusantara I	PN01	12,825,113	13,394,816	(569,703)	1,261,418	-	691,715	2,066,610	(1,539,951)	791,636	(748,315)	(1,539,951)	(748,315)
2	PT Perkebunan Nusantara IV	PN04	30,812,178	25,006,496	5,805,683	2,496,589	1,044,510	7,257,761	2,491,619	3,992,306	(37,605)	3,954,702	3,929,532	3,886,554
3	PT Rekayasa Industri	REIN	2,246,780	2,205,567	41,213	150,151	112,572	78,792	164,020	(107,044)	(14,978)	(122,022)	(110,460)	(124,094)
4	PT Asean Bintulu Fertilizer	ASBF			-			-		-		-		
5	PT Indosat Tbk	IDST	51,228,782	42,143,581	9,085,201	1,673,519	102,528	10,656,192	4,724,609	4,775,741	(39,798)	4,735,943	4,506,392	4,464,533
6	PT PANN Pembiayaan Maritim	PAPM	8,487	19,344	(10,857)	-	-	(10,857)	-	(10,979)	-	(10,979)	(10,979)	(10,979)
7	PT Bukit Asam Tbk	TBBA	38,488,867	31,924,559	6,564,308	1,794,043	-	8,358,351	204,038	6,292,521	(808,804)	5,483,717	6,105,856	5,297,052
8	PT Timah Tbk	TINS	8,391,907	8,917,910	(526,003)	297,519	13,116	(241,600)	205,098	(449,672)	(37,437)	(487,109)	(449,690)	(487,127)
9	PT Aneka Tambang Tbk	ANTM	41,047,693	38,430,799	2,616,894	1,690,682	237,951	4,069,625	215,144	3,077,648	2,753	3,080,401	3,077,646	3,080,399
10	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	PGAS	55,133,942	47,091,963	8,041,979	2,196,633	840,991	9,397,620	1,476,187	5,694,621	225,812	5,920,432	4,204,878	4,430,689
11	PT Indofarma Tbk	INFR	363,965	470,577	(106,612)	293	-	(106,319)	23,814	(120,346)	-	(120,346)	120,346	120,346
12	PT Kimia Farma Tbk	KIFR	7,715,277	7,668,703	46,574	214,191	26	260,740	410,372	(130,274)	-	(130,274)	177,364	177,364
13	PT Asuransi Jasa Indonesia	AJSI	1,166,279	1,324,736	(158,457)	271,245	315	112,472	-	103,522	4,426	107,948	102,890	107,299
14	PT Jasa Raharja	AJSR	7,587,627	5,701,627	1,886,000	-	338,674	1,547,326	-	1,297,201	(104,613)	1,192,588	1,289,025	1,184,347
15	PT Jaminan Kredit Indonesia	PSPU	6,354,728	3,577,332	2,777,396	1,301,265	2,286,676	1,791,985	-	1,436,849	57,517	1,494,366	1,437,013	1,494,520
16	PT Asuransi Kredit Indonesia	AKRI	12,594,007	10,581,366	2,012,641		475,475	1,537,167	-	1,383,025	62,283	1,445,308	1,382,906	1,445,308
17	PT Energy Management Indonesia	KONB	162,045	152,319	9,725	806	786	9,746	-	8,061	-	8,061	8,061	8,061
18	PT Pegadaian	PGDN	24,433,794	18,747,934	5,685,860	15,156	-	5,701,016	-	4,376,677	(159,221)	4,217,456	4,376,012	4,216,791
19	PT Permodalan Nasional Madani	PNMD	14,732,275	13,059,408	1,672,867	475,509	-	2,148,376	-	1,649,708	(3,601)	1,646,107	1,641,712	1,638,119
20	PT Hotel Indonesia Natour	HIIT	59,103	85,174	(26,071)	1,580	273	(24,763)	3,016	(28,793)	-	(28,793)	(32,658)	(32,658)
21	PT Sarinah	SRNH	1,124,651	1,097,901	26,750		41,228	(14,478)		27,746	-	27,746	27,746	27,746
22	PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko	TWCB	477,715	386,124	91,591	3,049	-	94,640	6,814	64,065	(351)	63,714	64,646	64,294
23	PT Angkasa Pura I	AKP1	9,338,015	6,717,557	2,620,457	273,571	41,505	2,852,523	1,602,355	922,152	(117,451)	804,701	922,231	804,790
24	PT Angkasa Pura II	AKP2	11,902,492	8,999,797	2,902,695	171,324	114,218	2,959,801	1,436,242	1,268,240	(91,613)	1,176,627	1,242,933	1,154,331
25	PT Sucofindo	SUCO	3,042,644	2,683,922	358,722	171,809		530,531	-	401,381	(12,194)	389,187	400,711	388,511
26	PT Surveyor Indonesia	SRVI	1,823,537	1,673,427	150,110	166,862	19,093	297,879	-	230,760	(5,526)	225,234	230,203	224,686
27	PT Perikanan Indonesia	PPIS	390,767	409,345	(18,578)	3,088	5,759	(21,249)	31,397	(52,645)	-	(52,645)	(52,645)	(52,645)
28	PT Berdikari	PPBR	2,157,938	2,133,852	24,086	51,658	31,788	43,956	-	33,909	-	33,909	33,909	33,909
29	PT Sang Hyang Seri	SHSR	540,483	594,812	(54,329)	4,093	24,130	(74,365)	-	(74,365)	-	(74,365)	(74,371)	(81,786)
30	PT Garam	GRAM	243,839	203,259	40,579	15,091	20,390	35,281	1,715	26,047	(169)	25,879	26,047	25,879
31	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	PPPI	1,720,196	1,708,650	11,546	12,113	-	23,659	15,474	6,142	(498)	5,644	6,136	5,638
32	PT Nindya Karya	NDYK	6,046,477	5,889,207	157,270	148,257	122,627	182,900	69,645	110,355	9,202	119,557	109,933	**119,081**
33	PT Kawasan Berikat Nusantara	KBRN	785,618	637,939	147,679	254,209	3,612	398,276	56,312	332,344	50,729	383,072	332,339	383,067
34	PT Kawasan Industri Wijayakusuma	KIWK	801,880	433,564	368,317	24,788	55,915	337,189	-	271,054	16,866	287,920	263,860	280,730
35	PT Kawasan Industri Medan	KIMD	241,630	154,499	87,131	12,143	53,447	45,826	-	39,890	694	40,584	40,584	40,584
36	PT Kawasan Industri Makassar	KIMK	54,964	41,470	13,494	18,025	-	31,519	179	26,287	2,238	28,524	26,287	28,524
37	PT Balai Pustaka	BLPS	23,762	43,458	(19,696)	-	7,248	(26,944)	270	(31,887)	2,337	(29,550)	(31,887)	(29,550)
38	PT Kliring Berjangka Indonesia	KLBI	149,515	71,443	78,073	3,659	408	81,323	-	60,707	(564)	60,143	60,578	60,014
39	PT Perusahaan Pengelola Aset	PPPA	1,179,270	1,039,660	139,610	36,187	10,930	164,867	7,223	159,690	1,925,450	2,085,140	159,696	2,085,146
40	PT Dahana	DAHA	3,922,099	3,295,754	626,344	4,587	17,471	613,459	20,411	458,457	117,758	576,215	456,232	541,443
41	PT Pindad	PIND	7,977,767	7,289,771	687,995	167,550	249,830	605,716	447,146	120,770	624,797	745,568	120,769	745,568
42	PT Dirgantara Indonesia	DIRI	3,649,945	3,277,021	372,924	72,484	115,066	330,342	287,649	24,497	500,098	524,595	24,497	**524,595**
43	PT PAL Indonesia	PPAL	3,613,174	3,483,251	129,923	39,312	77,459	91,777	65,770	28,792	543,844	572,636	28,787	572,635
44	PT Industri Nuklir Indonesia	BTEK	3,944	12,292	(8,347)	31	1,751	(10,068)	265	(10,333)	-	(10,333)	(10,333)	(10,333)
45	PT Semen Baturaja Tbk	SMBR	2,040,679	1,828,483	212,196	48,994	-	261,190	98,607	121,573	(15,333)	106,240	121,571	106,238
46	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	BRIS	17,160,021	9,568,662	7,591,359	-	191,887	7,399,472	-	5,703,743	34,189	5,737,932	5,703,743	5,737,932
47	PT Istaka Karya (Persero) (dalam pailit)	ISKA			-			-		-		-		
48	PT Indonesia Asahan Aluminium	INLM	8,311,107	8,145,156	165,951	7,615,603	-	7,781,554	5,631	7,258,310	(689,844)	6,568,466	6,174,517	5,655,282
			404,076,978	**342,324,487**	**61,752,490**	**23,159,086**	**6,659,655**	**78,251,921**	**16,137,632**	**49,228,502**	**2,833,029**	**52,061,531**	**46,624,614**	**49,584,518**

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN NON-BUMN (MINORITAS)
NERACA PER 31 DESEMBER 2023

dalam jutaan rupiah

NO	PERUSAHAAN MINORITAS	KODE	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	JUMLAH EKUITAS	KEPEMILIKAN NEGARA (Rp Juta)
			1	2	3=(1+2)	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	14=12+13	16
1	PT Perkebunan Nusantara I	PN01	9,558,318	64,159,549	73,717,867	10,739,948	32,663,829	43,403,776	8,945,336	870,069	-	34,897,715	(14,469,900)	30,243,219	30,314,091	946,239
2	PT Perkebunan Nusantara IV	PN04	16,393,817	50,048,833	66,442,650	13,712,229	31,898,565	45,610,794	2,942,116	7,781,402	-	3,688,289	6,600,183	21,011,989	20,831,856	593,847
3	PT Rekayasa Industri	REIN	2,271,659	2,048,231	4,319,890	9,719,172	1,591,191	11,310,363	450,000	5,676	-	352,809	(7,860,028)	(7,051,543)	(6,990,473)	22,366
4	PT Asean Bintulu Fertilizer	ASBF	1,172,961	3,241,429	4,414,390	276,692	552,986	829,679	2,517,911	-	-		1,066,800	3,584,711	3,584,711	125,307
5	PT Indosat Tbk	IDST	15,479,659	99,242,590	114,722,249	34,134,343	46,879,114	81,013,457	806,270	17,713,395		354,965	11,871,271	30,745,901	33,708,792	-
6	PT PANN Pembiayaan Maritim	PAPM			787,131			165,821	1,315,061	87,690	-	-	(781,441)	621,310	621,310	1
7	PT Bukit Asam Tbk	TBBA	15,148,356	23,616,833	38,765,189	9,968,101	7,233,892	17,201,993	1,152,066	594,303	-	669,037	19,019,132	21,434,538	21,563,196	-
8	PT Timah Tbk	TINS	5,519,186	7,334,091	12,853,277	3,982,242	2,628,686	6,610,928	372,388	64,383	-	69,257	5,736,029	6,242,057	6,242,349	-
9	PT Aneka Tambang Tbk	ANTM	20,064,546	22,786,783	42,851,329	8,576,440	3,109,219	11,685,659	2,403,076	9,696,068	-	4,154,409	14,389,642	30,643,195	31,165,670	-
10	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	PGAS	29,217,150	72,668,492	101,885,643	22,578,265	24,647,090	47,225,355	5,311,307	(7,218,885)	-	(739,258)	44,314,455	41,667,619	54,660,288	-
11	PT Indofarma Tbk	INFR	889,574	669,491	1,559,065	1,151,005	442,058	1,593,063	309,927	81,120	-	310,336	(735,370)	(33,987)	(33,998)	-
12	PT Kimia Farma Tbk	KIFR	8,602,236	11,948,437	20,550,673	8,839,235	2,269,402	11,108,637	556,239	(886,414)	-	6,707,531	1,674,930	8,052,286	9,442,036	-
13	PT Asuransi Jasa Indonesia	AJSI			15,756,061			12,715,496	425,000	495,098	-	1,850,107	264,502	3,034,707	3,040,565	1
14	PT Jasa Raharja	AJSR			18,207,187			6,453,876	8,500,000	13,504	-	(832,233)	3,986,627	11,667,898	11,753,311	1
15	PT Jaminan Kredit Indonesia	PSPU			32,231,220			18,877,198	10,638,733	-	-	(284,861)	2,999,304	13,353,176	13,354,022	1
16	PT Asuransi Kredit Indonesia	AKRI			35,840,486			24,003,397	9,611,000	-	-	(134,577)	2,360,319	11,836,742	11,837,089	1
17	PT Energy Management Indonesia	KONB	40,711	77,017	117,728	91,616	2,713	94,330	15,555	-	-		7,856	23,411	23,398	1
18	PT Pegadaian	PGDN			82,585,431			49,949,840	6,250,000	-	-	6,875,087	19,506,981	32,632,068	32,635,591	1
19	PT Permodalan Nasional Madani	PNMD			51,047,436			41,981,618	3,800,000	-	-	4,446,176	790,633	9,036,809	9,065,818	1
20	PT Hotel Indonesia Natour	HIIT	71,568	9,774,000	9,845,568	119,613	731,779	851,392	101,700	82	-	8,044,530	844,125	8,990,437	8,994,176	1
21	PT Sarinah	SRNH	382,719	1,069,787	1,452,506	1,191,852	205,549	1,397,401	46,850	181	-	(19,701)	27,746	55,076	55,105	1
22	PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko	TWCB	249,888	742,007	991,895	148,357	222,761	371,118	250,000	106	-	(9,063)	380,149	621,191	620,776	1
23	PT Angkasa Pura I	AKP1	6,594,495	37,147,323	43,741,817	3,018,376	30,555,187	33,573,563	6,414,412	39,388	-	(52,898)	3,763,040	10,163,941	10,168,254	1
24	PT Angkasa Pura II	AKP2	6,104,292	36,920,114	43,024,406	6,079,196	17,804,421	23,883,617	15,971,652	1,620,792	-	(1,245,516)	2,583,306	18,930,234	19,140,789	1
25	PT Sucofindo	SUCO	2,716,261	1,925,854	4,642,116	711,305	409,818	1,121,124	300,000	1,141	-	2,818,005	400,711	3,519,857	3,520,992	1
26	PT Surveyor Indonesia	SRVI	1,553,296	788,316	2,341,612	344,021	147,302	491,323	25,000	105	-	1,599,019	230,203	1,854,327	1,850,288	1
27	PT Perikanan Indonesia	PPIS	258,254	987,669	1,245,924	437,959	664,113	1,102,073	495,217	-	-	222,998	(574,364)	143,851	143,851	1
28	PT Berdikari	PPBR	924,777	190,521	1,115,298	887,362	17,290	904,652	75,000	-	-	85,791	49,880	210,671	210,646	1
29	PT Sang Hyang Seri	SHSR	404,700	5,811,917	6,216,617	1,134,886	2,115,637	3,250,524	1,506,993	1,008	-	1,458,082	-	2,966,084	2,966,093	1
30	PT Garam	GRAM	217,595	552,465	770,060	82,093	83,119	165,212	600,000	-	-	292,844	(287,995)	604,849	604,849	1
31	PT Perusahaan Perdagangan Indon	PPPI	1,021,568	3,608,207	4,629,775	860,095	928,456	1,788,551	942,745	-	-	(117,620)	2,016,037	2,841,162	2,841,223	1
32	PT Nindya Karya	NDYK	4,613,502	1,439,405	6,052,907	4,291,968	193,606	4,485,574	559,497	-	-	216,133	774,188	1,549,819	1,567,333	1
33	PT Kawasan Berikat Nusantara	KBRN	840,895	3,998,703	4,839,598	489,810	691,796	1,181,606	363,945	-	-	278,953	3,014,355	3,657,253	3,657,992	1
34	PT Kawasan Industri Wijayakusum	KIWK	1,013,355	2,140,327	3,153,682	593,937	432,589	1,026,526	89,488	933,131	-	38,181	849,828	1,910,629	2,127,156	1
35	PT Kawasan Industri Medan	KIMD	262,804	897,307	1,160,111	151,480	431,029	582,510	150,000	-	-		427,601	577,601	577,601	1
36	PT Kawasan Industri Makassar	KIMK	59,872	1,065,455	1,125,327	50,359	350,887	401,245	40,000	-	-	78,174	605,908	724,082	724,082	1
37	PT Balai Pustaka	BLPS	27,687	147,111	174,798	142,814	-	142,814	14,400	-	-	47,357	(29,773)	31,984	31,984	1
38	PT Kliring Berjangka Indonesia	KLBI	2,182,683	47,540	2,230,223	1,563,370	19,073	1,582,442				500,491	145,348	645,840	647,780	1
39	PT Perusahaan Pengelola Aset	PPPA	4,545,343	12,696,795	17,242,138	2,475,162	4,175,419	6,650,581	5,668,998	(1,386,916)	-	5,175,201	1,134,279	10,591,562	10,591,557	1
40	PT Dahana	DAHA	2,067,117	2,278,962	4,346,079	984,047	837,605	1,821,652	250,000	2,013	-	559,821	1,537,577	2,349,412	2,524,426	1
41	PT Pindad	PIND	12,206,301	4,207,231	16,413,532	10,561,420	1,418,586	11,980,006	1,367,542	-	-	2,361,395	704,555	4,433,492	4,433,525	1
42	PT Dirgantara Indonesia	DIRI	8,650,980	4,275,246	12,926,226	5,496,122	3,478,791	8,974,913	22,568,132	1,307,107	-	(19,923,933)	-	3,951,307	3,951,313	1
43	PT PAL Indonesia	PPAL	5,382,801	5,493,783	10,876,584	6,111,898	3,178,527	9,290,424	5,165,661	-	-	12,450	(3,591,925)	1,586,186	1,586,160	1
44	PT Industri Nuklir Indonesia	BTEK	13,425	16,572	29,997	54,010	25,725	79,735	27,200	-	-	5,821	(82,759)	(49,738)	(49,738)	1
45	PT Semen Baturaja Tbk	SMBR	816,846	4,039,885	4,856,731	731,493	962,825	1,694,318	993,253	1,270,607	-	(77,888)	976,463	3,162,436	3,162,412	-
46	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	BRIS			353,624,124			314,885,003	23,064,630	(3,929,100)		2,928,859	16,674,732	38,739,121	38,739,121	-
47	PT Istaka Karya (Persero) (dalam p	ISKA	238,151	247,267	485,417	375,782	62,330	438,112	652,898			147,662	(753,254)	47,306	47,306	50,000
48	PT Indonesia Asahan Aluminium	INLM	13,843,539	25,199,189	39,042,728	7,254,750	624,566	7,879,317	19,980,984	(538,617)	-	256,481	11,067,852	30,766,700	31,163,411	-
49	PT Pengembangan Pariwisata Indo	BTDC	947,120	6,349,237	7,296,356	1,984,797	3,447,106	5,431,903	2,147,660	148	-	14,665	(295,666)	1,866,807	1,864,454	1
Jumlah Kepemilikan Negara pada Perusahaan Kepemilikan Minoritas dengan Metode Biaya																**1,737,793**
Total Kepemilikan Negara pada Perusahaan Kepemilikan Minoritas																**1,737,793**

PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA DIBAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
LAPORAN LABA RUGI

No	Perusahaan Negara	Status Laporan	Pendapatan Usaha	HPP dan Beban Usaha	Laba (Rugi) Usaha	Pendapatan Lain-Lain	Beban Lain-Lain	Laba (Rugi) Sebelum Bunga dan Pajak	Beban Bunga	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Beban (Manfaat) Pajak	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Pendapatan (Beban) Komprehensif	Laba (Rugi) Komprehensif	Laba (Rugi) Tahun Berjalan Diatribusikan kepada Entitas Non Pengendali	Laba (Rugi) Komprehensif Diatribusikan kepada Entitas Pengendali
(1)	*(2)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(7 = 5 -6)*	*(8)*	*(9)*	*(10 = 7 + 8 - 9)*	*(11)*	*(12 = 10 - 11)*	*(13)*	*(14 = 12 -13)*	*(15)*	*(16 = 14 + 15)*	*(17)*	*(18)*
	Persero															
1	PT Sarana Multi Infrastruktur	Audited	7,616,289,104,366	5,146,859,050,271	2,469,430,054,095	42,098,302,402	29,135,255,153	2,482,393,101,344	-	2,482,393,101,344	404,257,572,845	2,078,135,528,499	238,952,897,522	2,317,088,226,021	2,078,135,528,499	2,317,088,226,021
2	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	Audited	1,318,005,557,000	482,466,290,000	835,539,267,000	-	-	835,539,267,000	-	835,539,267,000	(281,887,000)	835,821,154,000	116,344,837,000	952,165,991,000	835,821,154,000	952,165,991,000
3	PT Sarana Multigriya Finansial	Audited	2,086,305,000,000	1,507,775,000,000	578,530,000,000	-	-	578,530,000,000	-	578,530,000,000	112,911,000,000	465,619,000,000	(1,447,000,000)	464,172,000,000	465,619,000,000	464,172,000,000
4	PT Geo Dipa Energi	Audited	1,049,362,432,742	730,166,678,798	319,195,753,944	15,307,978,117	16,097,046,649	318,406,685,412	-	318,406,685,412	99,450,236,772	218,956,448,640	(6,638,704,983)	212,317,743,657	218,956,448,640	212,317,743,657
5	PT Bina Karya	Audited	20,353,897,142	39,925,001,796	(19,571,104,654)	3,333,350,292	668,052,943	(16,905,807,305)	-	(16,905,807,305)	-	(16,905,807,305)	5,797,190,932	(11,108,616,373)	(16,905,807,305)	(11,108,616,373)
	Total Persero		**12,090,315,991,250**	**7,907,192,020,865**	**4,183,123,970,385**	**60,739,630,811**	**45,900,354,745**	**4,197,963,246,451**	**-**	**4,197,963,246,451**	**616,336,922,617**	**3,581,626,323,834**	**353,009,020,471**	**3,934,635,344,305**	**3,581,626,323,834**	**3,934,635,344,305**
	Badan Usaha Lainnya															
1	PT Tuban Petrochemical Industries	Audited	4,118,985,000,000	4,116,322,000,000	2,663,000,000	246,481,000,000	275,888,000,000	(26,744,000,000)	-	(26,744,000,000)	(16,764,000,000)	(9,980,000,000)	79,572,000,000	69,592,000,000	(9,981,000,000)	69,591,000,000
2	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Audited	4,324,684,000,000	20,865,836,000,000	(16,541,152,000,000)	10,488,000,000	-	(16,530,664,000,000)	-	(16,530,664,000,000)	1,583,663,000,000	(18,114,327,000,000)	7,549,000,000	(18,106,778,000,000)	(18,114,327,000,000)	(18,106,778,000,000)
3	Lembaga Pengelola Investasi	Audited	5,417,815,000,000	1,098,050,000,000	4,319,765,000,000	-	950,000,000	4,318,815,000,000	-	4,318,815,000,000	20,190,000,000	4,298,625,000,000	12,485,463,000,000	16,784,088,000,000	4,298,625,000,000	16,784,088,000,000
	Total Badan Usaha Lainnya		**13,861,484,000,000**	**26,080,208,000,000**	**(12,218,724,000,000)**	**256,969,000,000**	**276,838,000,000**	**(12,238,593,000,000)**	**-**	**(12,238,593,000,000)**	**1,587,089,000,000**	**(13,825,682,000,000)**	**12,572,584,000,000**	**(1,253,098,000,000)**	**(13,825,683,000,000)**	**(1,253,099,000,000)**
			25,951,799,991,250	**33,987,400,020,865**	**(8,035,600,029,615)**	**317,708,630,811**	**322,738,354,745**	**(8,040,629,753,549)**	**-**	**(8,040,629,753,549)**	**2,203,425,922,617**	**(10,244,055,676,166)**	**12,925,593,020,471**	**2,681,537,344,305**	**(10,244,056,676,166)**	**2,681,536,344,305**

PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA DIBAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
NERACA

No	Perusahaan Negara	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Total Aset	Liabilitas Jangka Pendek	Liabilitas Jangka Panjang	Total Liabilitas	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYBDS	Ekuitas Lain	Saldo Laba (Rugi)	Ekuitas yang Didistibusikan kepada Pemilik Entitas Induk	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah Ekuitas	Saham Negara (%)	Kepemilikan Negara
(1)	*(2)*	*(5)*	*(6)*	*(7 = 5 + 6)*	*(8)*	*(9)*	*(10 = 8 + 9)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16 = 11 + 12 + 13 + 14 + 15)*	*(17)*	*(18 = 16 - 17)*	*(19)*	*(20 = 16 x 19)*
	Persero																
1	PT Sarana Multi Infrastruktur		-	115,757,445,062,894	-	-	73,495,979,089,230	30,516,600,000,000			203,178,530,891	11,541,687,442,773	42,261,465,973,664	-	42,261,465,973,664	100.00	42,261,465,973,664
2	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia		-	16,406,049,459,000	-	-	443,249,281,000	10,655,000,000,000			142,856,246,000	5,164,943,932,000	15,962,800,178,000	-	15,962,800,178,000	100.00	15,962,800,178,000
3	PT Sarana Multigriya Finansial		-	45,707,850,000,000	-	-	27,676,508,000,000	12,800,000,000,000			1,533,061,000,000	3,898,081,000,000	18,231,142,000,000	-	18,231,142,000,000	100.00	18,231,142,000,000
4	PT Geo Dipa Energi	981,738,049,857	6,190,368,338,279	7,172,106,388,136	461,321,745,192	2,369,549,833,409	2,830,871,578,601	3,975,443,770,000			(30,549,942,591)	396,340,982,126	4,341,234,809,535	-	4,341,234,809,535	94.50	4,102,656,727,592
5	PT Bina Karya		-	65,470,906,070	-	-	71,324,160,817	15,000,000,000			4,848,432,274	(25,701,687,021)	(5,853,254,747)		(5,853,254,747)	100.00	-
	Total Persero	**981,738,049,857**	**6,190,368,338,279**	**185,108,721,816,100**	**461,321,745,192**	**2,369,549,833,409**	**104,317,932,109,648**	**57,962,043,770,000**	-	-	**1,853,394,266,574**	**20,975,351,669,878**	**80,790,789,706,452**	-	**80,790,789,706,452**	**495**	**80,558,064,879,256**
	Badan Usaha Lainnya																
6	PT Tuban Petrochemical Industries	6,016,029,000,000	3,626,821,000,000	9,642,850,000,000	803,082,000,000	1,509,337,000,000	2,312,419,000,000	7,841,307,000,000	309,290,000,000		(820,181,000,000)	-	7,330,416,000,000	15,000,000	7,330,431,000,000	35.23	2,582,402,670,566
7	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia		-	51,349,279,000,000	-	-	42,587,812,000,000	37,602,431,000,000			126,756,000,000	(28,967,721,000,000)	8,761,466,000,000	1,000,000	8,761,467,000,000	100.00	8,761,466,000,000
8	Lembaga Pengelola Investasi		-	116,866,344,000,000	-	-	3,136,415,000,000	75,000,000,000,000		-	33,121,103,000,000	5,608,826,000,000	113,729,929,000,000	-	113,729,929,000,000	100.00	113,729,929,000,000
	Total Badan Usaha Lainnya	**6,016,029,000,000**	**3,626,821,000,000**	**177,858,473,000,000**	**803,082,000,000**	**1,509,337,000,000**	**48,036,646,000,000**	**120,443,738,000,000**	**309,290,000,000**	-	**32,427,678,000,000**	**(23,358,895,000,000)**	**129,821,811,000,000**	**16,000,000**	**129,821,827,000,000**	**235**	**125,073,797,670,566**
		6,997,767,049,857	**9,817,189,338,279**	**362,967,194,816,100**	**1,264,403,745,192**	**3,878,886,833,409**	**152,354,578,109,648**	**178,405,781,770,000**	**309,290,000,000**	-	**34,281,072,265,574**	**(2,383,543,330,122**	**210,612,600,706,452**	**16,000,000**	**210,612,616,706,452**		**205,631,862,549,822**

LAPORAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL

No	Institusi		Penyertaan Modal Pemerintah			Surat hutang		
				Asing	IDR	Utang dalam MUA		Utang dalam IDR
	A. PMN pada Lembaga Keuangan Internasional							
1	Asian Development Bank (ADB)		SDR	289,100,000	5,977,449,868,229			
	World Bank Group							
2		International Bank for Reconstruction and Development	USD	216,815,778	3,858,186,337,617			
3		International Development Association (IDA)	USD	107,348,690	1,657,356,424,865			(5,237,901,545)
4		International Finance Corporation (IFC)	USD	286,520,660	4,775,359,895,000			
5		Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)	USD	3,797,820	58,634,542,980	USD	1,135,018	(17,578,023,766)
6	Bank Pembangunan Islam (IDB)		ID	152,224,987	3,413,928,173,617			
7	International Islamic Trade finance Corporation (ITFC)		USD	2,060,000	31,804,340,000			
8	The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit		ID	246,693	5,100,643,571			
9	International Fund for Agricultural Development (IFAD)		USD	84,959,000	1,357,999,001,000			
10	Common Fund for Commodities (CFC) EUR 223.450 (Sept 2017)		EUR	223,450	19,703,156,520	EUR	223,450	(3,669,246,850)
			USD	1,028,901				
11	The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)		USD	22,242,517	343,402,219,963			
12	Credit Guarantee and Investment Facility		USD	21,600,000	472,433,400,000			
13	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)		USD	672,100,000	10,376,551,900,000			
		Jumlah			**32,347,909,903,362.00**			**(26,485,172,161.03)**
	PMN Lainnya							
15	ASEAN Infrastructure Fund		USD	120,000,000	1,852,680,000,000			
16	International Rubber Consortium Limited		USD	4,000,000	61,756,000,000			
		Jumlah		**-**	**1,914,436,000,000.00**			
	Jumlah			**-**	**34,262,345,903,362.00**	**-**	**-**	**(26,485,172,161)**

1. Kurs ID = kurs Islamic Dinar. Kurs ID sama dengan kurs SDR
2. Kurs Special Drawing Right (SDR); SDR1 = USD 1,33921\
3. Kurs Euro to IDR 17.086,34

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

status laporan	Nilai Awal Investasi Pemerintah	Surplus/Defisit Operasional	Penghasilan Komprehensif Lainnya	Saldo Awal Nilai Investasi Outstanding	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding
31-Dec-23	4,000,000,000,000	25,963,771,556,000	(15,916,819,000)	186,024,447,070,000	211,972,301,807,000

REALISASI PENGELUARAN PEMBIAYAAN

	ALOKASI PEMBIAYAAN ANGGARAN	DIPA 2022	REALISASI TUNAI S.D 31 DESEMBER 2023	% REALISASI
	PEMBIAYAAN ANGGARAN UAP BUN INVESTASI PEMERINTAH	**(127,029,218,619,000)**	**(90,228,306,945,654)**	**71.03%**
1	**PEMBIAYAAN INVESTASI**	**(126,698,707,114,000)**	**(89,897,795,440,654)**	**70.95%**
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**-**	**26,800,909,690,612**	**-**
1	Penerimaan pembiayaan dari UAP DJPK	-	2,944,155,651,898	
2	Penerimaan pembiayaan dari BPJT	-	359,653,415,387	
3	Penerimaan pembiayaan dari UAKPA KBUMN	-	5,285,019,139,000	
4	Penerimaan pembiayaan dari UAKPA BLU LMAN	-	18,207,083,934,327	
5	Penerimaan pembiayaan dari UAKPA BLU BPDLH	-	4,997,550,000	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**(126,698,707,114,000)**	**(116,698,705,131,266)**	**92.11%**
I	**Investasi Klaster Infrastruktur**	**(85,318,000,000,000)**	**(75,318,000,000,000)**	**88.28%**
1	PMN kepada PT Hutama Karya (Persero)	(28,884,000,000,000)	(28,884,000,000,000)	100%
2	PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	(1,530,000,000,000)	(1,530,000,000,000)	100%
3	PMN kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	(10,000,000,000,000)	-	0%
4	Investasi kepada BLU LMAN	(25,424,000,000,000)	(25,424,000,000,000)	100%
5	Investasi Pemerintah Program FLPP	(19,480,000,000,000)	(19,480,000,000,000)	100%
II	**Investasi Klaster Pendidikan**	**(20,000,000,000,000)**	**(20,000,000,000,000)**	**100.00%**
1	Dana Abadi Pendidikan	(10,000,000,000,000)	(10,000,000,000,000)	100%
2	Dana Abadi Penelitian	(5,000,000,000,000)	(5,000,000,000,000)	100%
3	Dana Abadi Kebudayaan	(2,000,000,000,000)	(2,000,000,000,000)	100%
4	Dana Abadi Perguruan Tinggi	(3,000,000,000,000)	(3,000,000,000,000)	100%
III	**Investasi Klaster Perlindungan Masyarakat**	**(4,300,000,000,000)**	**(4,300,000,000,000)**	**100.00%**
1	Investasi kepada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk Dana Bersama Penanggulangan Bencana	(4,300,000,000,000)	(4,300,000,000,000)	100%
IV	**Investasi Klaster Pangan dan Lingkungan Hidup**	**(5,589,910,242,000)**	**(5,589,910,241,052)**	**100.00%**
1	Investasi kepada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk Dana Reboisasi	(2,225,200,000,000)	(2,225,200,000,000)	100%
2	PMN kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	(2,564,710,242,000)	(2,564,710,241,052)	100%
3	Investasi kepada BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk Rehabilitasi Mangr	(800,000,000,000)	(800,000,000,000)	100%
V	**Investasi Klaster Kerja Sama Internasional**	**(3,559,634,510,000)**	**(3,559,632,528,929)**	**100%**
1	Investasi kepada BLU LDKPI	(2,000,000,000,000)	(2,000,000,000,000)	100%
2	Investasi kepada LKI	(1,559,634,510,000)	(1,559,632,528,929)	100%
	Islamic Development Bank (IsDB)	(262,412,536,000)	(262,234,488,551)	100%
	International Finance Corporation (IFC)	(349,192,795,000)	(348,532,048,980)	100%
	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	(45,978,000,000)	(45,891,000,000)	100%
	International Development Association (IDA)	(259,576,660,000)	(259,405,270,000)	100%
	International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	(504,540,519,000)	(505,896,721,398)	100%

	ALOKASI PEMBIAYAAN ANGGARAN	DIPA 2022	REALISASI TUNAI S.D 31 DESEMBER 2023	% REALISASI
	Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)	(137,934,000,000)	(137,673,000,000)	100%
			-	
VI	**Investasi Klaster Lainnya**	**(6,883,643,223,000)**	**(6,883,643,222,285)**	**100.00%**
1	PMN kepada PT Len Industri (Persero) (Tunai)	(1,754,000,000,000)	(1,754,000,000,000)	100%
	PMN kepada PT Len Industri (Persero) (Non Tunai)	(456,253,223,000)	(456,253,222,285)	100%
2	PMN kepada Perum LPPNPI/Airnav Indonesia	(659,190,000,000)	(659,190,000,000)	100%
3	PMN kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	(3,000,000,000,000)	(3,000,000,000,000)	100%
4	PMN kepada PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	(1,014,200,000,000)	(1,014,200,000,000)	100%
VII	**Investasi Pemerintah**	**(1,047,519,139,000)**	**(1,047,519,139,000)**	
1	PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Tbk	(1,047,519,139,000)	(1,047,519,139,000)	
2	**Kewajiban Penjaminan**	**(330,511,505,000)**	**(330,511,505,000)**	**100.00%**
I	**Penjaminan Pemerintah**	**(330,511,505,000)**	**(330,511,505,000)**	**100.00%**
1	Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional	(296,151,505,000)	(296,151,505,000)	100%
	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara	(7,702,826,000)	(7,702,826,000)	100%
	Penjaminan Irrfrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	(159,828,050,000)	(159,828,050,000)	100%
	Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara	(6,744,701,000)	(6,744,701,000)	100%
	Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	(96,767,407,000)	(96,767,407,000)	100%
	Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Light Rail Transit/LRT Jabodebek	(18,727,251,000)	(18,727,251,000)	
	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW (Infrastruktur Ketenagalistrikan)	(6,381,270,000)	(6,381,270,000)	100%
2	Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN	(34,360,000,000)	(34,360,000,000)	100%

PENJELASAN MUTASI LAIN LAIN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)

NO	BUMN	Saldo Ekuitas pada LKPN 2022	Laba Bersih	OCI Non Reval	OCI Reval	Laba Komprehensif	Dividen	PMN	Mutasi Ekuitas	ILKPN 2022 + Mutasi Ekuitas	Saldo Ekuitas	Selisih
				1	2	3=(1+2)	4	9	5	6=(4+5)	7	8
	Persero											
1	PT Sarana Multi Infrastruktur	40,547,733,124,174	2,078,135,528,499	238,952,697,522	-	2,317,088,226,021	(595,100,000,000)	-	1,721,988,226,021	42,269,721,350,195	42,261,465,973,664	(8,255,376,531)
2	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	15,153,468,912,000	835,821,154,000	116,344,837,000	-	952,165,991,000	(142,834,725,000)	-	809,331,266,000	15,962,800,178,000	15,962,800,178,000	-
3	PT Sarana Multigriya Finansial	16,320,507,000,000	465,619,000,000	(1,447,000,000)	-	464,172,000,000	(83,537,000,000)	1,530,000,000,000	1,910,635,000,000	18,231,142,000,000	18,231,142,000,000	-
4	PT Geo Dipa Energi	3,917,035,048,452	206,923,418,445	(6,273,866,505)	-	200,649,551,940	(15,027,872,800)	-	185,621,679,140	4,102,656,727,592	4,102,656,727,592	-
	Total Persero	**75,938,744,084,626**	**3,586,499,100,944**	**347,576,668,017**	**0**	**3,934,075,768,961**	**(836,499,597,800)**	**1,530,000,000,000**	**4,627,576,171,161**	**80,566,320,255,787**	**80,558,064,879,256**	**(8,255,376,531)**
	Badan Usaha Lainnya											
5	PT Tuban Petrochemical Industries	2,598,680,043,554	(3,516,166,211)	(12,761,206,777)	-	(16,277,372,989)	-	-	(16,277,372,989)	2,582,402,670,566	2,582,402,670,566	-
6	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	26,868,244,000,000	(18,114,327,000,000)	7,549,000,000	-	(18,106,778,000,000)	-	-	(18,106,778,000,000)	8,761,466,000,000	8,761,466,000,000	-
7	Lembaga Pengelola Investasi	96,945,841,000,000	4,298,625,000,000	12,485,463,000,000	-	16,784,088,000,000	-	-	16,784,088,000,000	113,729,929,000,000	113,729,929,000,000	-
	Total Lembaga/Badan Usaha Lainnya	**126,412,765,043,554**	**(13,819,218,166,211)**	**12,480,250,793,223**	**0**	**(1,338,967,372,989)**	**0**	**0**	**(1,338,967,372,989)**	**125,073,797,670,566**	**125,073,797,670,566**	**0**
	JUMLAH	**202,351,509,128,180**	**(10,232,719,065,267)**	**12,827,827,461,240**	**0**	**2,595,108,395,972**	**(836,499,597,800)**	**1,530,000,000,000**	**3,288,608,798,172**	**205,640,117,926,353**	**205,631,862,549,822**	**(8,255,376,531)**

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BANK INDONESIA
PER 31 DESEMBER 2023

status laporan	Nilai Awal Investasi Pemerintah	Surplus/Defisit TAB	Selisih Revaluasi		Kenaikan Investasi dari Selisih Revaluasi	Saldo Awal Nilai Investasi Outstanding	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding
			Saldo Periode Ini	Saldo Periode Lalu			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)=(2)+(5)+(6)
31-Dec-23	3,726,349,000,000	36,309,194,000,000	85,208,328,000,000	68,837,153,000,000	16,371,175,000,000	348,428,929,000,000	401,109,298,000,000

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BPJS
PER 31 DESEMBER 2023

BPJS	status laporan	Saldo Awal Nilai Investasi Awal	Perolehan/ Penambahan Investasi	Penghasilan/Rugi Operasional	Kontribusi Kepada Program DJS	Delta Saldo Selisih Transaksi dengan Kepentingan Non Pengendali	Penghasilan/Rugi Komprehensif Lain	Saldo Awal Nilai Investasi Outstanding	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)
BPJS Ketenagakerjaan	Audited	7,313,062,079,771	-	467,838,553,674	-	(70,718)	(848,505,724,381)	12,821,208,513,150	12,440,541,271,725
BPJS Kesehatan	Audited	9,649,555,725,127	-	(404,287,397,420)	-	-	(60,336,143,859)	10,753,648,947,992	10,289,025,406,713

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PTNBH
PER 31 DESEMBER 2023

Investee	Status Laporan	Nilai Kekayaan Awal	Surplus/(Defisit) Aktivitas	Surplus/(Defisit) Aktivitas untuk Kepentingan Non-Pengendali	Kenaikan/Penurunan Investasi dari aktivitas	Pendapatan Komprehensif Lainnya	Pendapatan Komprehensif Lainnya untuk Kepentingan Non-Pengendali	Kenaikan/Penurunan Investasi dari Pendp. Komp. Lainnya	saldo akhir nilai investasi outstanding
Institut Pertanian Bogor*	31-Dec-23	2,065,425,950,255	116,708,278,383	-	116,708,278,383	(1,345,713,555)	-	(1,345,713,555)	2,910,480,548,432
Universitas Airlangga	31-Dec-23	1,580,878,299,810	7,507,021,296	133,773,664	7,373,247,632	(413,922,270)	-	(413,922,270)	3,386,481,519,574
Institut Teknologi Bandung	31-Dec-23	1,480,261,453,553	(150,716,916,212)	(1,007,484,562)	(149,709,431,650)	2,055,188,847	-	2,055,188,847	2,137,070,933,465
Universitas Indonesia	31-Dec-23	3,391,030,031,348	193,008,784,676	-	193,008,784,676	(344,018,982)	-	(344,018,982)	4,791,021,213,805
Universitas Gajah Mada	31-Dec-23	2,732,049,610,116	24,822,823,529	-622,916,741	25,445,740,270	1,761,698,841	-	1,761,698,841	4,459,932,986,932
Universitas Pendidikan Indonesia*	31-Dec-23	1,260,368,332,545	94,855,931,098	-	94,855,931,098	(5,450,541,913)	-	(5,450,541,913)	1,142,149,933,753
Universitas Sumatera Utara	31-Dec-23	1,914,901,341,726	4,678,868,611	-	4,678,868,611	1,738,148,838	-	1,738,148,838	1,898,360,166,969
Universitas Padjajaran	31-Dec-23	1,332,124,751,039	62,764,593,449	-	62,764,593,449	(1,032,459,131)	-	(1,032,459,131)	1,346,990,132,121
Universitas Diponegoro*	31-Dec-23	1,782,365,799,939	422,185,213,764	-	422,185,213,764	12,330,041,563	-	12,330,041,563	4,086,012,209,152
Universitas Hassanudin	31-Dec-23	2,046,177,096,397	55,902,163,176	-	55,902,163,176	-	-	-	2,492,172,787,826
Institut Teknologi Sepuluh Nopember	31-Dec-23	949,575,199,295	232,008,450,689	3,684,862,382	228,323,588,307	(9,558,039,412)	217,940	(9,558,257,352)	1,879,170,650,604
Universitas Negeri Sebelas Maret*	31-Dec-23	1,520,066,455,977	27,318,007,846	-	27,318,007,846	(7,111,068,782)	-	(7,111,068,782)	1,706,907,381,088
Universitas Negeri Malang	31-Dec-23	1,846,612,548,097	73,108,535,103	-	73,108,535,103	20,775,892	-	20,775,892	1,954,637,430,081
Universitas Andalas*	31-Dec-23	1,454,766,175,940	54,502,989,799	-	54,502,989,799	(17,275,455,686)	-	(17,275,455,686)	1,278,810,808,161
Universitas Brawijaya	31-Dec-23	3,422,807,945,353	63,763,622,242	-	63,763,622,242	16,990,418,610	-	16,990,418,610	3,610,213,266,896
Universitas Negeri Padang*	31-Dec-23	1,846,612,548,097	77,738,312,302	-	77,738,312,302	13,688,638,015	-	13,688,638,015	1,358,228,340,298
Universitas Syah Kuala*	31-Dec-23	1,532,599,687,465	14,495,090,890	-	14,495,090,890	1,514,466,095,471		1,514,466,095,471	1,528,961,186,362
Universitas Terbuka*	31-Dec-23	3,552,533,805,610	99,597,445,931	-	99,597,445,931	3,575,430,782,737	-	3,575,430,782,737	3,675,028,228,669
Universitas Negeri Surabaya	31-Dec-23	1,677,983,220,365	87,464,258,486	160,509	87,464,097,977	1,677,983,220,365	-	1,677,983,220,365	1,765,447,318,343
Universitas Negeri Yogyakarta*	31-Dec-23	1,373,142,652,142	79,326,412,280	-	79,326,412,280	1,373,142,652,142	-	1,373,142,652,142	1,452,469,064,423
Universitas Negeri Semarang*	31-Dec-23	1,708,859,618,819	159,271,010,501	-	159,271,010,501	1,708,859,618,819		1,708,859,618,819	1,868,130,629,321

*menggunakan angka Unaudited 2023

PERHITUNGAN PENYESUAIAN BAGIAN NEGARA PADA SKK MIGAS TAHUN 2023

(dalam Rupiah)

No	Kontraktor	Bagian Negara Awal	Kewajiban Pemerintah				Penyesuaian HGBT			Bagian Negara Akhir	Keterangan
			PBB	PPN	PDRD	Total	Penurunan GOI Entitlement	Besaran Kept-Whole Bagian KKKS	Total		
1	2	4	5	6	7	8 = 5+6+7	9	10	11 = 9+10	13 = 4 - 8- 11 - 12	14
1	BP BERAU LTD.	10.531.262.601.153	775.460.590.418	1.846.965.593.361	5.249.924.736	2.627.676.108.515	1.824.586.478.741	3.851.897.219.808	5.676.483.698.549	2.227.102.794.090	
2	BP MUTURI HOLDINGS B.V	3.163.827.936.047	226.941.686.930	-	-	226.941.686.930	548.984.405.787	1.158.964.801.619	1.707.949.207.407	1.228.937.041.710	
3	BP WIRIAGAR LTD.	698.497.420.116	80.780.736.012	-	-	80.780.736.012	184.416.019.453	389.321.942.750	573.737.962.203	43.978.721.901	
4	MEDCO E&P GRISSIK LTD.	8.492.922.647.867	615.519.097.716	187.795.102.216	-	803.314.199.932	1.493.952.818.647	2.489.921.364.412	3.983.874.183.059	3.705.734.264.876	
5	EMP (BENTU) LTD.	1.035.567.865.022	-	-	-	-	141.385.295.484	132.263.486.970	273.648.782.453	761.919.082.568	
6	HUSKY CNOOC MADURA LTD.	1.645.440.899.543	92.585.388.182	308.066.873.897	-	400.652.262.079	344.036.387.436	537.894.344.178	881.930.731.614	362.857.905.850	
7	KANGEAN ENERGY INDONESIA LIMITED	588.850.190.250	106.338.720.719	60.752.363.108	-	167.091.083.827	134.872.616.290	130.140.020.620	265.012.636.910	156.746.469.513	
8	MEDCO ENERGI SAMPANG PTY. LTD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak terdapat penyesuaian bagi hasil yang merupakan implementasi dari Kebijakan HGBT pada FQR Kuartal IV 2023
9	MEDCO ENERGI MADURA OFFSHORE PTY. LTD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak terdapat penyesuaian bagi hasil yang merupakan implementasi dari Kebijakan HGBT pada FQR Kuartal IV 2023
10	PEARL OIL (SEBUKU) LTD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak terdapat penyesuaian bagi hasil yang merupakan implementasi dari Kebijakan HGBT pada FQR Kuartal IV 2023
11	PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG LTD.	3.821.278.528.372	290.848.572.345	141.874.754.601	-	432.723.326.945	131.556.577.668	180.723.292.929	312.279.870.597	3.076.275.330.830	
12	PT MEDCO E&P INDONESIA	901.467.968.112	87.813.958.337	43.062.519.280	926.880.733	131.803.358.350	102.394.538.010	77.678.757.858	180.073.295.868	589.591.313.894	
13	PT PERTAMINA EP	4.910.118.417.217	1.128.082.853.303	1.259.437.855.724	387.419.362	2.387.908.128.389	896.811.551.260	1.844.883.830.570	2.741.695.381.830	- 219.485.093.003	
14	PT PERTAMINA HULU MAHAKAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak terdapat penyesuaian bagi hasil yang merupakan implementasi dari Kebijakan HGBT pada FQR Kuartal IV 2023
15	PT PHE WMO	313.114.279.486	-	-	-	-	28.413.887.147	43.073.470.972	71.487.358.119	241.626.921.367	
16	PHE OGAN KOMERING / GROSS SPLIT	39.772.059.331	-	-	-	-	24.355.640.583	-	24.355.640.583	15.416.418.747	
17	PT PERTAMINA HULU ENERGI OSES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak terdapat penyesuaian bagi hasil yang merupakan implementasi dari Kebijakan HGBT pada FQR Kuartal IV 2023
18	PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ LTD.	540.864.560.195	-	-	-	-	233.901.302.493	95.572.035.578	329.473.338.071	211.391.222.124	
19	PT PERTAMINA HULU ENERGI JAMBI MERANG / GROSS SPLIT	1.934.356.699.610	-	-	-	-	397.336.278.163	190.983.276.364	588.319.554.527	1.346.037.145.083	
20	MINARAK BRANTAS GAS INC. / GROSS SPLIT	11.471.503.282	-	-	-	-	2.200.209.698	1.120.669.249	3.320.878.947	8.150.624.335	
21	PHE NSO / GROSS SPLIT	78.404.131.028	-	-	-	-	21.938.783.466	15.437.194.389	37.375.977.854	41.028.153.173	
22	PC KETAPANG II LTD.	490.263.431.973	28.535.863.539	17.894.170.821	-	46.430.034.359	30.782.395.964	51.303.993.273	82.086.389.238	361.747.008.376	
23	JINDI SOUTH JAMBI B, Co. Ltd.	42.214.086.354	-	-	-	-	7.325.805.251	4.088.456.254	11.414.261.504	30.799.824.850	
24	SAKA INDONESIA PANGKAH LTD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak terdapat penyesuaian bagi hasil yang merupakan implementasi dari Kebijakan HGBT pada FQR Kuartal IV 2023
25	PT PERTAMINA EP CEPU	310.003.512.286	-	-	-	-	87.909.676.825	146.516.128.041	234.425.804.866	75.577.707.421	
26	MEDCO LEMATANG	170.152.614.628	-	-	-	-	27.095.909.060	23.338.073.016	50.433.982.076	119.718.632.552	
	Total	**39.719.851.351.871**	**3.432.907.467.501**	**3.865.849.233.006**	**6.564.224.831**	**7.305.320.925.338**	**6.664.256.577.427**	**11.365.122.358.850**	**18.029.378.936.276**	**14.385.151.490.257**	

No	Kontraktor	Bagian Negara Awal	Kewajiban Pemerintah				Penyesuaian HGBT			Bagian Negara Akhir	Keterangan
			PBB	PPN	PDRD	Total	Penurunan GOI Entitlement	Besaran Kept-Whole Bagian KKKS	Total		
1	2	4	5	6	7	8 = 5+6+7	9	10	11 = 9+10	13 = 4 - 8- 11 - 12	14
1	MEDCO EP MALAKA	81.298.459.247	3.135.779.299	-	-	3.135.779.299	3.458.340.691	48.416.510.302	51.874.850.993	26.287.828.954	Berdasarkan Berita Acara Penyesuaian Gas Bumi Bagian Negara diserahkan untuk KKKS Medco untuk Menutupi Kekurangan KKKS dan Adjustment penyesuaian Penerimaan Bagian Negara dan KKKS Terkait Penerapan Kepmen ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023
2	PHE NSB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PT PHE NSB resmi menyerahkan pengelolaan WK B kepada PT Pema Global Energi (PGE) pada Mei
3	TRIANGLE PASE INC,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak terdapat penyesuaian bagi hasil yang merupakan implementasi dari Kebijakan HGBT
4	PEMA GLOBAL ENERGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak terdapat penyesuaian bagi hasil yang merupakan implementasi dari Kebijakan HGBT
	Total	**81.298.459.247**	**3.135.779.299**	**-**	**-**	**3.135.779.299**	**3.458.340.691**	**48.416.510.302**	**51.874.850.993**	**26.287.828.954**	

PERHITUNGAN PENYESUAIAN BAGIAN NEGARA PADA BPMA TAHUN 2023

(dalam Rupiah)

No	Kontraktor	Wilayah Kerja	Bagian Negara Awal	Kewajiban Pemerintah		Penyesuaian HGBT			Bagian Negara Akhir	Keterangan
				PBB	Total	Penurunan GOI Entitlement	Besaran Kept-Whole Bagian KKKS	Total		
1	2	3	4	5	8 = 5+6+7	9	10	11 = 9+10	13 = 4 - 8- 11 - 12	14
1	MEDCO EP MALAKA	ACEH	81.298.459.247	3.135.779.299	3.135.779.299	3.458.340.691	48.416.510.302	51.874.850.993	26.287.828.954	Berdasarkan Berita Acara Penyesuaian Gas Bumi Bagian Negara diserahkan untuk KKKS Medco untuk Menutupi Kekurangan KKKS dan Adjustment penyesuaian Penerimaan Bagian Negara dan KKKS Terkait Penerapan Kepmen ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023
2	PHE NSB	BLOCK B	-	-	-	-	-	-	-	PT PHE NSB resmi menyerahkan pengelolaan WK B kepada PT Pema Global Energi (PGE) pada Mei 2021
3	TRIANGLE PASE INC,	BLOCK PASE	-	-	-	-	-	-	-	Tidak terdapat penyesuaian bagi hasil yang merupakan implementasi dari Kebijakan HGBT
4	PEMA GLOBAL ENERGI	BLOCK B	-	-	-	-	-	-	-	Tidak terdapat penyesuaian bagi hasil yang merupakan implementasi dari Kebijakan HGBT
	Total		**81.298.459.247**	**3.135.779.299**	**3.135.779.299**	**3.458.340.691**	**48.416.510.302**	**51.874.850.993**	**26.287.828.954**	

Catatan:

Data Penerimaan Bagian Negara di atas masih bersifat sementara, berdasarkan FQR Preliminary Kuartal IV Tahun 2023.

REKAP PEMBAYARAN DAN PENIHILAN RPATA TAHUN 2024

BA	Nama BA	Tahun 2024							
		Saldo RPATA 2023	SP2D Pembayaran					SP2D Penihilan	Saldo RPATA s.d 2024
			SPM Pembayaran RPATA Bruto	Potongan Denda Keterlambatan	Potongan Pajak	Potongan Lainnya	SPM Pembayaran RPATA Netto		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4 - 5 -6 -7	9	10 = 3 - 4 - 9
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	742.468.268	742.468.268	-	53.905.139	-	688.563.129	-	-
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	35.403.568.880	35.403.568.880	-	3.843.616.367	-	31.559.952.513	-	-
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	5.914.708.033	5.914.708.033	-	487.834.973	-	5.426.873.060	-	-
005	MAHKAMAH AGUNG	164.453.156.381	163.587.797.247	5.075.279.014	19.937.045.874	-	138.575.472.359	865.359.134	-
006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	248.013.768.928	248.013.768.928	1.003.487.193	28.432.394.716	-	218.577.887.019	-	-
007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	237.719.668.619	233.018.785.194	1.127.779.109	26.005.760.228	-	205.885.245.857	4.700.883.425	-
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	54.982.239.721	54.982.239.717	-	3.853.011.079	-	51.129.228.638	4	-
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	40.663.449.156	40.565.684.168	-	4.092.309.230	-	36.473.374.938	97.764.988	-
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	577.964.961.998	570.445.410.748	4.134.754.977	31.729.271.072	-	534.581.384.699	7.519.551.250	-
013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	833.050.593.508	813.133.511.947	5.288.566.793	84.989.981.523	117.633.601	722.737.330.030	19.917.081.561	-
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	510.645.771.918	488.960.675.452	4.280.507.404	46.614.749.117	6.838.039	438.058.580.892	21.685.096.466	-
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	660.244.080.795	636.949.222.457	527.094.439	56.605.588.637	62.000.000	579.754.539.381	23.294.858.338	-
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	7.850.073.481	7.850.073.481	-	813.217.749	-	7.036.855.732	-	-
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	594.258.899.682	460.724.067.697	11.331.009.335	48.145.953.925	12.175.166.534	389.071.937.903	133.534.831.985	-
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1.416.892.474.833	1.275.434.457.147	8.149.839.361	91.750.344.173	359.259.307	1.175.175.014.306	141.458.017.686	-
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	408.135.621.483	339.861.780.125	2.398.129.642	36.888.102.490	-	300.575.547.993	68.273.841.358	-
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	1.562.396.968.456	1.538.305.716.932	12.938.716.355	170.323.808.747	17.794.996	1.355.025.396.834	24.091.251.524	-
025	KEMENTERIAN AGAMA	420.777.574.782	369.670.052.976	1.298.911.552	39.743.119.671	-	328.628.021.753	51.107.521.806	-
026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	286.811.381.440	285.196.116.441	3.214.238.270	32.133.383.212	37.308.872	249.811.186.087	1.615.264.999	-
027	KEMENTERIAN SOSIAL	103.190.049.904	92.425.379.524	-	5.203.154.597	-	87.222.224.927	10.764.670.380	-
029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	38.219.968.021	34.974.382.127	1.152.965.653	3.104.890.296	-	30.716.526.178	3.245.585.894	-
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	32.493.421.582	32.468.636.616	100.966.504	2.412.707.742	-	29.954.962.370	24.784.966	-
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	7.949.937.531.100	7.112.972.140.096	293.316.663.454	854.018.352.757	1.328.521.837	5.964.308.602.048	836.965.391.004	-
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	7.842.606.562	7.816.840.687	-	777.498.516	-	7.039.342.171	25.765.875	-
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	3.277.806.321	3.266.911.032	-	382.528.757	-	2.884.382.275	10.895.289	-
040	KEMENTERIAN PARIWISATA	63.899.729.487	63.899.729.487	587.544.520	7.624.803.628	-	55.687.381.339	-	-
041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	11.344.665.203	11.256.707.349	216.066.400	1.301.691.705	-	9.738.949.244	87.957.854	-
044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	20.620.420.567	18.863.155.804	326.978.657	1.815.418.889	37.433.880	16.683.324.378	1.757.264.763	-
047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.684.548.015	1.684.548.015	-	182.489.857	-	1.502.058.158	-	-

BA	Nama BA	Tahun 2024							
		Saldo RPATA 2023	SP2D Pembayaran					SP2D Penihilan	Saldo RPATA s.d 2024
			SPM Pembayaran RPATA Bruto	Potongan Denda Keterlambatan	Potongan Pajak	Potongan Lainnya	SPM Pembayaran RPATA Netto		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4 - 5 -6 -7	9	10 = 3 - 4 - 9
048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	11.686.842.500	11.686.842.500	-	1.319.579.316	-	10.367.263.184	-	-
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	17.547.906.106	17.547.906.106	-	1.751.792.183	-	15.796.113.923	-	-
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	10.107.356.265	10.045.392.765	-	558.251.703	-	9.487.141.062	61.963.500	-
054	BADAN PUSAT STATISTIK	54.066.534.264	47.215.048.148	1.087.296.392	5.273.965.948	-	40.853.785.808	6.851.486.116	-
055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	20.068.813.422	19.516.291.120	21.030.256	1.934.542.113	-	17.560.718.751	552.522.302	-
056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	68.514.360.945	62.083.173.115	1.009.172.221	6.918.646.992	-	54.155.353.902	6.431.187.830	-
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	6.626.508.423	6.626.508.423	25.128.600	792.848.351	-	5.808.531.472	-	-
059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.485.208.136.055	2.411.975.754.763	12.604.069.641	119.353.923.190	83.885.653	2.279.933.876.279	73.232.381.292	-
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1.116.162.870.158	1.113.347.116.006	14.618.398.339	105.154.700.841	-	993.574.016.826	2.815.754.152	-
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	11.064.623.482	10.375.414.591	739.971.902	1.197.367.812	-	8.438.074.877	689.208.891	-
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	2.019.100.728	2.019.100.728	-	131.004.000	-	1.888.096.728	-	-
065	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	79.696.684.428	79.332.108.604	-	7.407.133.913	-	71.924.974.691	364.575.824	-
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.201.800.544	1.095.924.644	-	47.270.351	-	1.048.654.293	105.875.900	-
067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	18.484.428.220	18.475.808.362	56.030.520	445.512.259	560.151.482	17.414.114.101	8.619.858	-
068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	6.787.300.350	6.787.300.350	-	207.867.580	-	6.579.432.770	-	-
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	254.452.000	254.452.000	-	22.095.315	-	232.356.685	-	-
075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	151.915.247.075	149.317.489.290	747.346.994	15.690.525.615	-	132.879.616.681	2.597.757.785	-
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	110.460.053.683	108.950.518.134	1.373.886.526	11.173.256.730	-	96.403.374.878	1.509.535.549	-
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	50.291.868.079	50.289.123.457	129.202.112	5.646.987.858	-	44.512.933.487	2.744.622	-
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	900.470.326	899.531.266	-	80.038.686	-	819.492.580	939.060	-
083	BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL	10.339.245.176	10.339.245.176	41.609.200	401.742.468	-	9.895.893.508	-	-
084	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	1.531.074.180	1.531.074.180	-	179.314.994	-	1.351.759.186	-	-
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	113.377.500	113.377.500	-	2.042.838	-	111.334.662	-	-
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	851.277.941	851.277.941	-	98.607.597	-	752.670.344	-	-
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	6.174.788.731	6.174.788.731	191.596.234	752.021.504	-	5.231.170.993	-	-
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	21.071.862.270	20.892.754.629	31.638.425	2.246.335.656	-	18.614.780.548	179.107.641	-
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	12.989.789.262	11.995.950.762	156.395.300	1.322.076.619	-	10.517.478.843	993.838.500	-
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	12.051.226.198	11.839.432.039	395.460.487	1.337.705.593	-	10.106.265.959	211.794.159	-

BA	Nama BA	Tahun 2024							
		Saldo RPATA 2023	SP2D Pembayaran					SP2D Penihilan	Saldo RPATA s.d 2024
			SPM Pembayaran RPATA Bruto	Potongan Denda Keterlambatan	Potongan Pajak	Potongan Lainnya	SPM Pembayaran RPATA Netto		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4 - 5 -6 -7	9	10 = 3 - 4 - 9
092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	7.664.203.182	7.544.650.182	-	309.096.429	-	7.235.553.753	119.553.000	-
093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	26.638.648.071	25.624.106.699	9.616.182	2.884.091.622	-	22.730.398.895	1.014.541.372	-
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	2.259.716.717	2.146.696.191	-	179.534.096	-	1.967.162.095	113.020.526	-
100	KOMISI YUDISIAL RI	2.696.802.508	2.696.802.508	-	326.713.830	-	2.370.088.678	-	-
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	11.016.049.734	10.253.484.666	-	108.600.601	-	10.144.884.065	762.565.068	-
104	BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)	8.145.934.753	7.950.013.408	-	890.548.690	-	7.059.464.718	195.921.345	-
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	2.862.472.875	2.862.472.875	-	290.615.109	-	2.571.857.766	-	-
107	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)	20.758.685.470	20.758.685.470	540.877.234	2.192.267.399	-	18.025.540.837	-	-
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	1.993.577.926	1.993.577.926	-	24.005.838	-	1.969.572.088	-	-
110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	60.051.000	60.051.000	-	7.033.000	-	53.018.000	-	-
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	476.254.200	476.254.200	-	55.777.519	-	420.476.681	-	-
113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	1.374.916.000	1.374.916.000	-	169.077.508	-	1.205.838.492	-	-
114	SEKRETARIAT KABINET	5.699.184.710	5.537.950.021	-	658.894.479	-	4.879.055.542	161.234.689	-
115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	28.064.985.937	28.064.985.937	63.746.298	3.239.065.840	-	24.762.173.799	-	-
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	11.908.821.618	11.908.821.618	79.001.657	1.380.344.225	-	10.449.475.736	-	-
117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	53.483.426.977	53.468.306.377	13.516.800	2.882.268.962	-	50.572.520.615	15.120.600	-
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	1.753.801.350	1.753.801.350	-	52.614.041	-	1.701.187.309	-	-
119	BADAN KEAMANAN LAUT	58.511.119.887	58.511.119.887	69.664.168	4.051.936.502	-	54.389.519.217	-	-
122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)	305.693.231	305.693.231	-	30.751.273	-	274.941.958	-	-
123	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	1.340.116.387	485.656.387	-	11.118.807	-	474.537.580	854.460.000	-
124	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	198.119.782.359	141.702.859.499	1.066.567.222	16.456.125.068	-	124.180.167.209	56.416.922.860	-
125	BADAN PANGAN NASIONAL	1.288.600.000	1.288.600.000	-	134.733.333	-	1.153.866.667	-	-
126	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	9.328.146.500	9.328.146.500	-	1.040.622.744	-	8.287.523.756	-	-
999	BENDAHARA UMUM NEGARA	84.149.721.371	53.544.257.548	789.474.375	2.473.247.669	-	50.281.535.504	30.605.463.823	-
Grand Total		**21.127.520.888.198**	**19.589.609.151.385**	**392.330.195.717**	**1.934.563.177.275**	**14.785.994.201**	**17.247.929.784.192**	**1.537.911.736.813**	**-**

Catatan:
Merupakan rekapitulasi SP2D Pembayaran dan Penihilan RPATA dengan tanggal buku Tahun 2024

Penyetoran Pajak Rokok Ke RKUD Provinsi Dan Rekening BPJS Kesehatan TA 2023.

No.	Provinsi	Desember 2022		Triwulan I 2023		Triwulan II 2023		Triwulan III 2023		Triwulan IV 2023	
		RKUD	BPJS	RKUD	BPJS	RKUD	BPJS	RKUD	BPJS	RKUD	BPJS
1	Provinsi Aceh	59.043.579.719	-	94.829.433.620	12.020.632.428	81.425.512.933	10.321.543.894	72.496.332.869	9.189.675.996	35.299.510.027	33.819.058.367
2	Provinsi Sumatera Utara	156.076.898.194	12.247.393.933	294.217.471.470	9.757.247.263	258.552.849.031	2.455.747.642	231.370.898.182	1.015.308.844	196.633.452.500	-
3	Provinsi Sumatera Barat	61.650.626.101	401.409.623	110.696.225.406	1.003.976.848	95.082.194.077	829.443.443	85.393.898.657	-	72.255.997.162	-
4	Provinsi Riau	64.919.417.341	6.650.702.759	128.507.508.143	3.495.377.853	113.344.583.965	-	100.915.135.709	-	85.389.282.772	-
5	Provinsi Jambi	39.381.909.644	58.828.165	72.348.331.801	-	62.122.062.762	-	55.309.712.867	-	46.800.281.036	-
6	Provinsi Sumatera Selatan	93.724.539.945	416.085.408	167.635.421.591	4.095.022.500	147.456.743.789	-	131.286.531.655	-	111.088.021.602	-
7	Provinsi Bengkulu	22.311.792.545	227.477.882	36.496.780.338	4.160.543.104	33.851.970.033	1.058.534.960	31.082.194.012	-		-
8	Provinsi Lampung	84.460.916.159	13.703.978.974	171.697.096.342	5.095.478.558	151.803.354.138	-	134.041.579.532	1.114.910.069	114.362.584.243	-
9	Provinsi DKI Jakarta	124.696.113.891	-	223.426.203.738	-	191.845.427.609	-	170.807.520.616	-	144.528.683.183	-
10	Provinsi Jawa Barat	483.018.701.789	44.624.150.072	957.823.714.949	8.151.517.730	827.939.409.998	1.497.462.101	738.480.230.655	-	624.864.613.158	-
11	Provinsi Jawa Tengah	383.520.479.987	29.258.276.205	744.500.334.248	48.323.750	639.308.430.613	-	569.201.410.235	-	481.629.438.746	-
12	Provinsi DI Yogyakarta	40.755.649.720	-	73.038.674.726	-	62.714.827.314	-	55.837.474.434	-	47.246.846.176	-
13	Provinsi Jawa Timur	420.965.006.444	33.581.166.132	815.381.987.938	1.773.729.019	701.652.650.049	-	624.708.917.915	-	528.597.083.748	-
14	Provinsi Kalimantan Barat	49.309.802.215	11.252.641.634	103.521.974.558	5.356.061.965	92.835.824.610	652.553.765	83.236.375.845	-	70.430.410.503	-
15	Provinsi Kalimantan Tengah	19.211.064.258	10.061.079.836	47.111.920.061	5.971.933.529	40.452.759.337	5.127.814.565	38.277.150.341	2.305.025.182	34.338.583.968	-
16	Provinsi Kalimantan Selatan	41.308.652.988	4.193.282.204	69.232.736.718	13.021.586.072	70.085.444.443	542.420.438	62.882.762.634	-	53.208.212.646	-
17	Provinsi Kalimantan Timur	42.178.347.840	-	77.295.388.905	-	66.369.864.808	-	59.091.697.899	-	50.000.405.448	-
18	Provinsi Sulawesi Utara	24.486.393.686	4.962.936.254	47.823.243.925	5.092.249.327	45.436.010.908	-	40.453.465.410	-	34.229.675.982	-
19	Provinsi Sulawesi Tengah	33.619.592.483	27.012.917	61.071.247.748	-	52.438.968.406	-	46.688.473.573	-	39.505.424.475	-
20	Provinsi Sulawesi Selatan	101.927.555.223	-	183.830.541.479	-	157.446.882.377	399.638.074	140.536.957.968	-	118.915.264.390	-
21	Provinsi Sulawesi Tenggara	29.603.120.159	-	52.280.714.176	1.160.654.388	45.508.509.365	379.045.598		-		-
22	Provinsi Bali	47.041.574.923	348.343.099	85.147.252.693	-	73.111.885.845	-	65.094.384.080	-	55.079.574.833	-
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	59.934.775.739	-	108.708.444.813	-	93.342.758.061	-	83.106.724.359	-	70.320.705.974	-
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	59.535.147.773	1.277.740.175	106.528.248.816	2.988.710.918	92.873.173.409	1.163.817.862	83.724.827.458	-	70.843.713.548	-
25	Provinsi Maluku	19.703.891.785	1.091.672.547	37.004.609.137	467.532.147	31.774.093.390	401.447.562	28.641.347.027	5.801.060	24.239.767.518	-
26	Provinsi Papua	43.878.516.619	3.896.730.723	20.393.385.179	193.725.648	17.523.678.905	153.491.516	15.737.331.920	1.347.332	13.317.274.199	-
27	Provinsi Maluku Utara	9.793.690.864	4.808.873.321	23.573.110.611	2.988.140.781				-		-
28	Provinsi Banten	110.124.193.621	20.588.932.073	219.351.616.137	21.861.478.925	202.557.921.793	4.560.261.271	184.405.454.770	-	156.034.567.177	-
29	Provinsi Bangka Belitung	16.138.381.830	-	29.243.636.533	-	25.110.116.279	-	22.356.522.944	-	18.916.958.750	-
30	Provinsi Gorontalo	13.291.876.793	-	22.994.918.049	915.963.875	20.432.342.512	98.791.663	18.279.675.297	-	15.467.336.510	-
31	Provinsi Kepulauan Riau	22.788.871.840	-	41.731.894.171	-	35.833.187.640	-	31.903.694.619	-	26.995.292.452	-
32	Provinsi Papua Barat	12.734.961.054	-	10.767.044.411	314.787.728	9.515.440.847	-	8.471.970.789	-	7.168.553.104	-
33	Provinsi Sulawesi Barat	15.982.285.312	-	28.742.329.080	-	24.679.667.472	-	21.973.277.461	-	18.592.675.810	-
34	Provinsi Kalimantan Utara	7.675.528.981	-	14.093.649.028	-	12.101.544.401	-	10.774.480.374	-	9.116.820.235	-
35	Provinsi Papua Selatan*			10.249.682.819	-		-		-		-
36	Provinsi Papua Tengah*			26.553.889.140	192.405.695	22.965.768.042	-	20.447.325.470	-		-
37	Provinsi Papua Pegunungan*			26.744.682.528	2.206.383.977	24.858.900.346	-		-		-
38	Provinsi Papua Barat Daya*			11.977.158.790	-		-		-		-
TOTAL		**2.814.793.857.465**	**203.678.713.936**	**5.356.572.503.815**	**112.333.464.028**	**4.624.354.759.507**	**29.642.014.354**	**4.067.015.737.576**	**13.632.068.483**	**3.375.417.011.875**	**33.819.058.367**

RINCIAN PENDAPATAN HIBAH-LO TAHUN 2023 BERDASARKAN PEMBERI HIBAH

No.	Nama Pemberi Hibah	Nilai Realisasi Pendapatan Hibah (dalam Rp)
1	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	1.707.558.229.720
2	Global Fund	1.378.353.439.393
3	Department of Foreign Affairs and Trade	1.156.645.932.775
4	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	1.087.247.956.734
5	United States Agency for International Development	869.354.344.476
6	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	764.612.502.798
7	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	715.767.292.257
8	Government of Australia	637.108.781.713
9	Government of Japan	430.196.481.035
10	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	408.411.729.708
11	Government of The United Arab Emirates	388.650.000.000
12	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	356.498.071.628
13	United Nations Development Programme	339.089.351.361
14	Pemerintah Provinsi Banten	314.932.831.484
15	Corporations	291.364.216.894
16	United Nations Children's Fund	277.072.971.663
17	International Bank for Reconstruction & Development	264.287.047.683
18	Food and Agriculture Organization	262.131.723.803
19	Pemerintah Provinsi Riau	219.056.430.572
20	World Health Organization	202.664.228.133
21	Lainnya	14.738.146.230.687
Total		**26.809.149.794.517**

RINCIAN PENDAPATAN HIBAH-LO TAHUN 2023 AUDITED PER KEMENTERIAN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH

KEMENTERIAN/LEMBAGA	PENGESAHAN TAYL	PENGESAHAN TAB	TOTAL
002-DEWAN PERWAKILAN RAKYAT		**101.882.000**	**101.882.000**
Hibah Barang dan Jasa		101.882.000	101.882.000
004-BADAN PEMERIKSA KEUANGAN		**168.356.616.496**	**168.356.616.496**
Hibah Barang dan Jasa		168.356.616.496	168.356.616.496
005-MAHKAMAH AGUNG	**18.804.921.132**	**154.938.367.375**	**173.743.288.507**
Hibah Barang dan Jasa	18.804.921.132	145.326.112.965	164.131.034.097
Hibah Uang		9.612.254.410	9.612.254.410
006-KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	**150.920.477.374**	**835.483.177.243**	**986.403.654.617**
Hibah Barang dan Jasa	150.920.477.374	584.697.440.898	735.617.918.272
Hibah Uang		250.785.736.345	250.785.736.345
007-KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA		**284.254.545.732**	**284.254.545.732**
Hibah Barang dan Jasa		284.254.545.732	284.254.545.732
010-KEMENTERIAN DALAM NEGERI		**332.082.746.332**	**332.082.746.332**
Hibah Barang dan Jasa		74.889.438.069	74.889.438.069
Hibah Uang		257.193.308.263	257.193.308.263
011-KEMENTERIAN LUAR NEGERI		**8.699.820.808**	**8.699.820.808**
Hibah Barang dan Jasa		8.699.820.808	8.699.820.808
012-KEMENTERIAN PERTAHANAN	**381.473.703.358**	**1.901.404.581.336**	**2.282.878.284.694**
Hibah Barang dan Jasa	373.615.103.358	1.267.146.629.705	1.640.761.733.063
Hibah Uang	7.858.600.000	634.257.951.631	642.116.551.631
013-KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	**14.368.743.920**	**78.551.469.023**	**92.920.212.943**
Hibah Barang dan Jasa	14.368.743.920	72.353.235.039	86.721.978.959
Hibah Uang		6.198.233.984	6.198.233.984
015-KEMENTERIAN KEUANGAN	**6.300.151.579**	**78.815.665.526**	**85.115.817.105**
Hibah Barang dan Jasa	6.300.151.579	77.317.165.526	83.617.317.105
Hibah Uang		1.498.500.000	1.498.500.000
018-KEMENTERIAN PERTANIAN	**56.545.313.232**	**344.288.990.361**	**400.834.303.593**
Hibah Barang dan Jasa	56.545.313.232	336.011.804.067	392.557.117.299

RINCIAN PENDAPATAN HIBAH-LO TAHUN 2023 AUDITED PER KEMENTERIAN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH

KEMENTERIAN/LEMBAGA	PENGESAHAN TAYL	PENGESAHAN TAB	TOTAL
Hibah Uang		8.277.186.294	8.277.186.294
019-KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN		**46.280.621.146**	**46.280.621.146**
Hibah Barang dan Jasa		46.280.621.146	46.280.621.146
020-KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		**305.010.921.743**	**305.010.921.743**
Hibah Barang dan Jasa		278.820.030.754	278.820.030.754
Hibah Uang		26.190.890.989	26.190.890.989
022-KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	**4.517.026.000**	**240.589.453.547**	**245.106.479.547**
Hibah Barang dan Jasa	4.517.026.000	236.920.066.021	241.437.092.021
Hibah Uang		3.669.387.526	3.669.387.526
023-KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	**54.089.630.614**	**210.714.401.747**	**264.804.032.361**
Hibah Barang dan Jasa	1.253.296.500	180.785.632.286	182.038.928.786
Hibah Uang	52.836.334.114	29.928.769.461	82.765.103.575
024-KEMENTERIAN KESEHATAN	**4.277.921.334**	**3.229.252.108.711**	**3.233.530.030.045**
Hibah Barang dan Jasa	4.277.921.334	2.266.024.318.268	2.270.302.239.602
Hibah Uang		963.227.790.443	963.227.790.443
025-KEMENTERIAN AGAMA	**87.253.189.794**	**1.179.492.409.201**	**1.266.745.598.995**
Hibah Barang dan Jasa	87.253.189.794	140.117.274.398	227.370.464.192
Hibah Uang		1.039.375.134.803	1.039.375.134.803
026-KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	**1.019.412.701**	**15.722.185.282**	**16.741.597.983**
Hibah Barang dan Jasa	1.019.412.701	15.722.185.282	16.741.597.983
027-KEMENTERIAN SOSIAL	**494.566.244**	**127.346.542.256**	**127.841.108.500**
Hibah Barang dan Jasa	494.566.244	5.749.968.355	6.244.534.599
Hibah Uang		121.596.573.901	121.596.573.901
029-KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	**54.986.137.679**	**319.240.078.043**	**374.226.215.722**
Hibah Barang dan Jasa	54.455.402.209	267.447.747.230	321.903.149.439
Hibah Uang	530.735.470	51.792.330.813	52.323.066.283
032-KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	**18.229.914.784**	**355.848.151.332**	**374.078.066.116**
Hibah Barang dan Jasa	18.229.914.784	332.111.593.050	350.341.507.834
Hibah Uang		23.736.558.282	23.736.558.282
033-KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	**4.980.579.024**	**283.532.443.390**	**288.513.022.414**
Hibah Barang dan Jasa	4.980.579.024	283.532.443.390	288.513.022.414

RINCIAN PENDAPATAN HIBAH-LO TAHUN 2023 AUDITED PER KEMENTERIAN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH

KEMENTERIAN/LEMBAGA	PENGESAHAN TAYL	PENGESAHAN TAB	TOTAL
034-KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN		**822.566.500**	**822.566.500**
Hibah Barang dan Jasa		822.566.500	822.566.500
035-KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN		137.028.856.836	137.028.856.836
Hibah Barang dan Jasa		130.351.273.694	130.351.273.694
Hibah Uang		6.677.583.142	6.677.583.142
036-KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN		**3.353.138.096**	**3.353.138.096**
Hibah Barang dan Jasa		3.053.716.096	3.053.716.096
Hibah Uang		299.422.000	299.422.000
040-KEMENTERIAN PARIWISATA		**24.482.715.831**	**24.482.715.831**
Hibah Barang dan Jasa		24.482.715.831	24.482.715.831
041-KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA		**52.450.256.467**	**52.450.256.467**
Hibah Barang dan Jasa		52.450.256.467	52.450.256.467
047-KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		**25.879.132.324**	**25.879.132.324**
Hibah Barang dan Jasa		14.999.345.985	14.999.345.985
Hibah Uang		10.879.786.339	10.879.786.339
048-KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI		**26.850.400.755**	**26.850.400.755**
Hibah Barang dan Jasa		26.850.400.755	26.850.400.755
050-BADAN INTELIJEN NEGARA		**31.587.818.790**	**31.587.818.790**
Hibah Barang dan Jasa		31.587.818.790	31.587.818.790
054-BADAN PUSAT STATISTIK	**421.960.000**	**14.674.326.892**	**15.096.286.892**
Hibah Barang dan Jasa	421.960.000	12.083.423.292	12.505.383.292
Hibah Uang		2.590.903.600	2.590.903.600
055-KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL		**957.284.766.703**	**957.284.766.703**
Hibah Barang dan Jasa		936.776.983.439	936.776.983.439
Hibah Uang		20.507.783.264	20.507.783.264
056-KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	**17.514.300.218**	**125.434.841.957**	**142.949.142.175**
Hibah Barang dan Jasa	15.173.628.243	104.329.336.895	119.502.965.138
Hibah Uang	2.340.671.975	21.105.505.062	23.446.177.037
060-KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	**181.821.265.639**	**2.152.322.127.706**	**2.334.143.393.345**
Hibah Barang dan Jasa	137.542.506.639	973.168.054.472	1.110.710.561.111
Hibah Uang	44.278.759.000	1.179.154.073.234	1.223.432.832.234

RINCIAN PENDAPATAN HIBAH-LO TAHUN 2023 AUDITED PER KEMENTERIAN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH

KEMENTERIAN/LEMBAGA	PENGESAHAN TAYL	PENGESAHAN TAB	TOTAL
063-BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN		**8.144.839.250**	**8.144.839.250**
Hibah Barang dan Jasa		4.814.477.840	4.814.477.840
Hibah Uang		3.330.361.410	3.330.361.410
064-LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL		**2.686.332.881**	**2.686.332.881**
Hibah Barang dan Jasa		2.686.332.881	2.686.332.881
066-BADAN NARKOTIKA NASIONAL	**809.488.506**	**36.457.083.198**	**37.266.571.704**
Hibah Barang dan Jasa	809.488.506	18.974.276.598	19.783.765.104
Hibah Uang		17.482.806.600	17.482.806.600
067-KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	**150.576.941.486**	**6.671.494.355**	**157.248.435.841**
Hibah Barang dan Jasa	150.576.941.486	5.954.738.816	156.531.680.302
Hibah Uang		716.755.539	716.755.539
068-BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL		**26.001.280.070**	**26.001.280.070**
Hibah Barang dan Jasa		22.376.372.490	22.376.372.490
Hibah Uang		3.624.907.580	3.624.907.580
074-KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA		**12.829.523.431**	**12.829.523.431**
Hibah Uang		12.829.523.431	12.829.523.431
075-BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA		70.000.000	70.000.000
Hibah Barang dan Jasa		70.000.000	70.000.000
076-KOMISI PEMILIHAN UMUM	**6.674.396.525**	**9.532.571.959.646**	**9.539.246.356.171**
Hibah Barang dan Jasa	6.674.396.525	47.169.520.321	53.843.916.846
Hibah Uang		9.485.402.439.325	9.485.402.439.325
078-PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN		**5.997.600.000**	**5.997.600.000**
Hibah Barang dan Jasa		5.997.600.000	5.997.600.000
084-BADAN STANDARDISASI NASIONAL		**2.435.107.696**	**2.435.107.696**
Hibah Barang dan Jasa		2.435.107.696	2.435.107.696
085-BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR		**1.764.294.980**	**1.764.294.980**
Hibah Barang dan Jasa		1.764.294.980	1.764.294.980
086-LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA		**3.572.729.399**	**3.572.729.399**
Hibah Barang dan Jasa		3.572.729.399	3.572.729.399
087-ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA		**109.189.000**	**109.189.000**
Hibah Uang		109.189.000	109.189.000

RINCIAN PENDAPATAN HIBAH-LO TAHUN 2023 AUDITED PER KEMENTERIAN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH

KEMENTERIAN/LEMBAGA	PENGESAHAN TAYL	PENGESAHAN TAB	TOTAL
088-BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	**7.887.525.400**	**3.512.637.669**	**11.400.163.069**
Hibah Barang dan Jasa	7.887.525.400	3.512.637.669	11.400.163.069
089-BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN		**193.418.686**	**193.418.686**
Hibah Barang dan Jasa		193.418.686	193.418.686
090-KEMENTERIAN PERDAGANGAN	**-**	**20.900.612.435**	**20.900.612.435**
Hibah Barang dan Jasa	-	20.900.612.435	20.900.612.435
093-KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI		**46.041.224.432**	**46.041.224.432**
Hibah Barang dan Jasa		46.041.224.432	46.041.224.432
100-KOMISI YUDISIAL RI		**76.064.500**	**76.064.500**
Hibah Barang dan Jasa		76.064.500	76.064.500
103-BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	**32.428.205.329**	**94.000.653.084**	**126.428.858.413**
Hibah Barang dan Jasa	32.428.205.329	92.725.682.999	125.153.888.328
Hibah Uang		1.274.970.085	1.274.970.085
106-LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	**1.940.482.680**	**8.788.229.427**	**10.728.712.107**
Hibah Barang dan Jasa	1.940.482.680	8.788.229.427	10.728.712.107
107-BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)	**309.974.267**	**908.029.625**	**1.218.003.892**
Hibah Barang dan Jasa	309.974.267	908.029.625	1.218.003.892
110-OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA		**8.082.972.076**	**8.082.972.076**
Hibah Barang dan Jasa		8.082.972.076	8.082.972.076
111-BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	**1.063.988.000**		**1.063.988.000**
Hibah Barang dan Jasa	1.063.988.000		1.063.988.000
115-BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	**909.173.508**	**2.556.958.253.601**	**2.557.867.427.109**
Hibah Barang dan Jasa	909.173.508	7.942.194.404	8.851.367.912
Hibah Uang		2.549.016.059.197	2.549.016.059.197
116-LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	**324.836.740**	**5.720.248.192**	**6.045.084.932**
Hibah Barang dan Jasa	324.836.740	5.345.794.692	5.670.631.432
Hibah Uang		374.453.500	374.453.500
117-LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	**264.846.662**	**2.492.915.613**	**2.757.762.275**
Hibah Barang dan Jasa	264.846.662	2.106.322.613	2.371.169.275
Hibah Uang		386.593.000	386.593.000
119-BADAN KEAMANAN LAUT	**333.840.000**	**3.544.074.793**	**3.877.914.793**

RINCIAN PENDAPATAN HIBAH-LO TAHUN 2023 AUDITED PER KEMENTERIAN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH

KEMENTERIAN/LEMBAGA	PENGESAHAN TAYL	PENGESAHAN TAB	TOTAL
Hibah Barang dan Jasa	333.840.000	3.544.074.793	3.877.914.793
124-BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	**498.524.470**	**31.372.863.431**	**31.871.387.901**
Hibah Barang dan Jasa		13.492.676.206	13.492.676.206
Hibah Uang	**498.524.470**	**17.880.187.225**	**18.378.711.695**
999-BENDAHARA UMUM NEGARA		-	-
Hibah Barang dan Jasa		0	0
GRAND TOTAL	**1.262.041.438.199**	**26.474.081.758.957**	**27.736.123.197.156**

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BUN
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gedung Juanda I, Jl. Wahidin Raya No. 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710 Telepon (021) 3449230
Faximile (021) 3852143 Email portalkemenkeu@kemenkeu.go.id
Situs https://www.kemenkeu.go.id/

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BUN
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gedung Juanda I, Jl. Wahidin Raya No. 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710 Telepon (021) 3449230
Faximile (021) 3852143 Email portalkemenkeu@kemenkeu.go.id
Situs https://www.kemenkeu.go.id/